SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik serta menjamin ketercapaian visi dan misi Wali Kota, perlu disusun dokumen rencana strategis perangkat daerah yang menetapkan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun;

b. bahwa rencana strategis perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketercapaian visi dan misi melalui program Wali Kota yang dituangkan dalam rencana strategis, maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mulai Tahun 2025-2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. tujuan;
b. sasaran;
c. strategi;
d. arah kebijakan
e. program, kegiatan dan sub kegiatan;
f. indikator dan target kinerja; dan
g. pagu anggaran indikatif.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:

a. bab I : Pendahuluan;
b. bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis;
c. bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
d. bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
e. bab V : Penutup.

(2) Ketentuan mengenai penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah, mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan Rancangan Akhir dengan menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:

a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
b. hasil pengendalian dan evaluasi terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja Perangkat Daerah dengan perencanaannya di RKPD; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar, antara lain:
    1. terjadinya bencana alam;
    2. pandemik;
    3. goncangan politik;
    4. krisis ekonomi, konflik sosial budaya;
    5. pemekaran Daerah; atau
    6. adanya perubahan kebijakan nasional.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 - 2029

PENJABARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029

A. PENGANTAR

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun untuk periode jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2025-2029 yang dimaksudkan untuk acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Renstra Perangkat Daerah memuat gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis; tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan; program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD serta bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah juga memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal tersebut juga dilakukan untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan sistematika Restra disajikan secara lengkap dalam uraian lampiran peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dari seluruh Perangkat daerah sebagai berikut:

1. DINAS PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan maka Dinas Pendidikan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, khususnya bidang pendidikan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. QPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lebaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 92).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Pendidikan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang pendidikan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Bab II ini memuat gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah membantu Wali Kota Semarang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UPTD;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. penyelenggaraan kerja sama Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UPTD;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dan UPTD;
8. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dan UPTD;
9. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural telah disesuaikan dengan susunan organisasi dan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

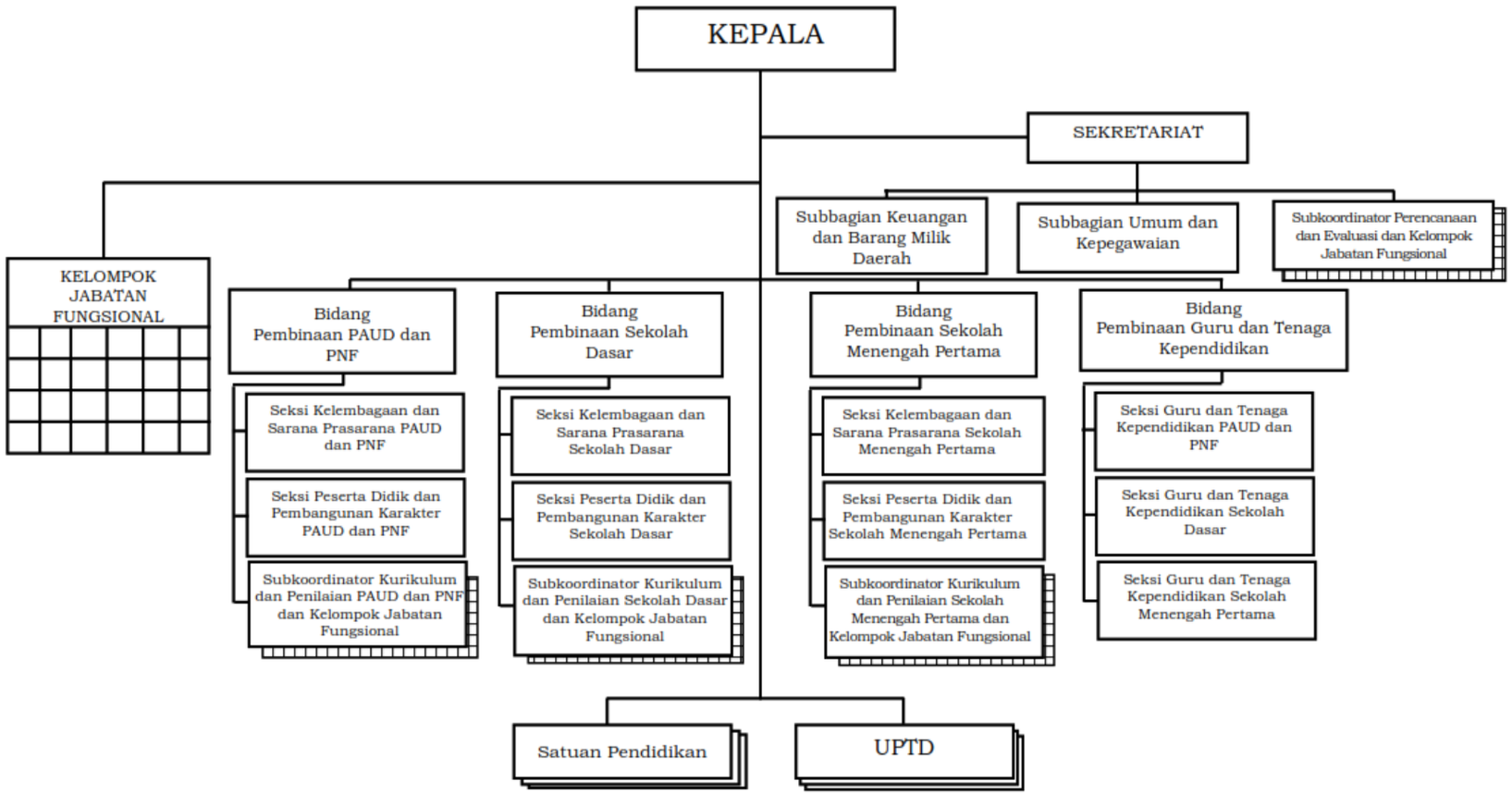

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Pada Dinas Pendidikan, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Dinas

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, Renstra, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta fungsi dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP dan Bidang Pembinaan GTK. Sekretariat, terdiri atas Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Sub Koordinator dan Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF, dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF terdiri atas Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF, dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

d. Bidang Pembinaan SD

Bidang Pembinaan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kurikulum dan Penilaian SD, Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana SD, dan Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter SD. Bidang Pembinaan SD terdiri atas Seksi Kurikulum dan Penilaian SD, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Pembinaan SMP

Bidang Pembinaan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana SMP dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP. Bidang Pembinaan SMP terdiri atas Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

f. Bidang Pembinaan GTK

Bidang Pembinaan GTK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pembinaan GTK mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi GTK PAUD dan PNF, Seksi GTK SD, dan Seksi GTK SMP.Bidang Pembinaan GTK terdiri atas Seksi GTK PAUD dan PNF, Seksi GTK SD dan Seksi GTK SMP. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

g. Satuan Pendidikan Formal

Satuan Pendidikan Formal adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi satuan pendidikan. Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Formal serta dibantu oleh Pejabat Fungsional.

h. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan

Korsatpen Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang melaksanakan kegiatan koordinasi layanan administrasi di wilayah kerja kecamatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah atau pegawai negeri sipil lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

i. Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Satuan PNF SKB adalah unsur pelaksana tugas teknis satuan pendidikan pada Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi Satuan PNF SKB. Satuan PNF SKB terdiri atas: dipimpin oleh seorang Kepaladengan dibantu oleh Pejabat Fungsional.

j. Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pendidikan di klasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	1	37	56	94
2	SMP Sederajat	7	-	110	43	160
3	SMA Sederajat	137	60	849	714	1.760
4	D3	76	125	85	190	476
5	S1	1.711	3.827	1.476	5.141	12.155
6	S2	164	217	117	151	649
7	S3	5	88	112	2.393	2.598
	Jumlah	2.100	4.318	2.786	8.688	17.892

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 17.892 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	71	95	166
2	Golongan III	538	1.371	1.909
3	Golongan IV	206	547	753
4	III	10	0	10
5	V	91	36	127
6	VII	14	16	30
7	IX	1.160	2.162	3.322

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan berasal dari APBD Kota Semarang, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Pendidikan

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	6,578.00	1992	Jl.Dr.Wahidin no.118 Semarang	Hak Pakai		HP 10	Kantor Dinas Pendidikan	Pembelian	16,860,700.00	Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	960.00	1970	Jl. Jenderal Sudirman 295 Semarang	Hak Pakai	8/24/2011	HP 55	Gedung Kantor	Pembelian	2,344,200.00	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG BARAT (Lahan sudah diminta pemkot untuk di alih fungsi menjadi taman)
3	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	635.00	2005	Jl. Gajahmada No. 294 Inspeksi Kel. Bangunharjo	Hak Pakai	6/24/2005	0002	Kosong	Pembelian	1,114,000.00	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG TENGAH
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,300.00	1990	Jl. Wismasari Utara Ngaliyan	Hak Pakai	3/5/1996		Gedung Kantor Departemen Pendidikan	Pembelian	800,000.00	UPTD Pendidikan Kec.Ngaliyan
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	800.00	2011	Jl. Prof Dr. Hamka no. 3	Hak Pakai			Gedung Kantor UPTD Pendidikan	Pembelian	850,000.00	UPTD Pendidikan Kec.Ngaliyan
6	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,680.00	1996	Jl. Raya Desel Ngaliyan	Hak Pakai	7/4/2007	HP 32	SDN Ngaliyan 06	Pembelian	312,000.00	UPTD Pendidikan Kec.Ngaliyan Properti Investasi
7	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	751.00	1986	Jl. Mr Wuryanto	Hak Pakai	2/24/1998	HP 00002	Kantor UPTD Pendidikan Kec.Gunungpati	Pembelian	15,000.00	UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati
8	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,000.00	1999	Jl. Tapaksari, Tugurejo	Hak Pakai	11/14/2005		Tanah Lapang	Pembelian	1000.00	Kantor UPTD Kecamatan TUGU

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
9	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	420.00	2010	Jl. Genuksari No.1 Kel. Genuk Semarang	Hak Pakai			Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk	Pembelian	253,000.00	Kantor UPTD Kecamatan GENUK
10	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	6,578.00	1992	Jl.Dr. Wahidin no.118 Semarang	Hak Pakai		HP 10	Kantor Dinas Pendidikan	Pembelian	16,860,700.00	Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang

Sumber: KIB Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Dinas Pendidikan

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan)
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	420.66	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,812,969,640
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	463.11	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,606,828,000
3	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	331.84	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,312,774,000
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	200	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	124.760,000
5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	156.51	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	64.900,000
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	222.6	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	534.172,800
7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	265.68	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	670.081,360

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan)
8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	110	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	365.972,000
9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	265	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	454.500,000
10	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	122	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	136.039,000
11	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	180	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	39.900,000
12	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	155	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	103.527,000
13	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	200	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	173.958,000
14	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	200	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	27.266,100
15	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	130	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	445.482,440
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	100	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	457.118,000
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	155	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	62.192,000
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	117.39	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	59.240,000
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	155	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	29.630,000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan)
20	Pagar Permanen	Baik	155	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	14.850,000
21	Pagar Permanen	Baik	155	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Searang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	14.850,000
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	400	Jl. Simongan Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	653.732,000
23	Pagar Permanen	Baik	175.02	Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	482.333,260
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	222	Jl. RM Hadi Soebeno Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	444.562,900
25	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Kurang Baik	390.2	Jl. Menoreh Tengah X no 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	563.500,000
26	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	150	Jl. Prof Dr Hamka no. 3		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1000,000
27	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Kurang Baik	234	Jl. Raya Desel Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	585,500,000
28	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Kurang Baik	150	Jl. Raya Desel Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	11,250,000
29	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	144	Jl. Prof Dr Hamka No.3		Tanah Milik Pemda	Pembelian	328,339,000
30	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Kurang Baik	200	Jl. Raya Desel Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	18,000,000
31	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	6	Jl. Prof. Dr. Hamka No. 3 Ngaliyan			Pembelian	50,154,007
32	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	155	Jl. Prof Dr Hamka no. 3		Tanah Milik Pemda	Pembelian	250,000
33	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	150	Jl. Prof Dr Hamka no. 3		Tanah Milik Pemda	Pembelian	900,000
34	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	500	Jl. Mr. Wuryanto		Tanah Milik Pemda	Pembelian	270,000,000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan)
35	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	Kurang Baik	200	Jl. Dewi Sartika		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1000,000
36	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jalan Bulusan IV Kelurahan Bulusan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	340,550,000
37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	104	Jl. Tapak Tugurejo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	500,000,000
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	104	Jl. Tapak Tugurejo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	500,000,000
39	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	580	Jl. Taman Teuku Umar No. 2 Tinjomoyo Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	660,099,954
40	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	104	Jalan Bulusan IV Kelurahan Bulusan			Pembelian	194,776,400
41	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	1.9	Jl. RM Hadi Soebeno Mijen			Pembelian	31,895,000
42	Pagar Permanen	Baik	30.5	Jl. Tapak Tugurejo			Pembelian	87,393,000
43	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	594	Jl. Tapak Tugurejo Telp. (024) 84310310 Semarang 50151		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2,335,272,000
44	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	181	JL. MR. WURYANTO		Tanah Milik Pemda	Pembelian	385,466,000
45	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Jl. Menoreh Tengah X / 9 Sampangan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	97,250,000
46	Pagar Permanen	Baik	749	Jl. Prof. Dr. Hamka no. 03 Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	153,348,000
47	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	207	Jl Mataram No 827		Tanah Milik Pemda	Pembelian	721,363,000

Sumber: KIB Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025

Data sarana dan prasarana dalam tabel di atas belum termasuk sarana prasarana tanah maupun gedung bangunan sekolah negeri yang ada di Kota Semarang yang berjumlah 325 SD, 46 SMP dan 13 TK.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pendidikan.

a. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

Tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pendidikan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kota Semarang (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Indikator Tujuan dan Sasaran																			
	Indikator Tujuan :																			
	1.	Angka Partisipasi Kasar	%			NA	NA	103,44	103,46	103,47	NA	NA	86,89	106,05	102,09			84,00%	102,50%	98,67%
	Indikator Sasaran :																			
	Sasaran 1:																			
	1.	Nilai AKIP	Poin			NA	NA	76,15	77,15	78,25	NA	NA	77,21	77,15	78,05			101,39%	100%	99,74%
	Sasaran 2:																			
	2.	Angka Partisipasi Murni (APM)	%			NA	NA	79,22	80,15	81,78	NA	NA	81,76	80,15	88,1			103,21%	100%	107,73%
	3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%			NA	NA	86,61	86,73	87,2	NA	NA	95,46	86,73	95,58			110,22%	100%	109,61%
II	Indikator Kinerja Kunci																			
	1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun		Target Indikator Lainnya	10,53	10,55	10,57	10,59	10,61	10,53	10,78	10,8	10,81	11,05	100%	102,18%	102,18%	102,08%	104,15%
	2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun		Target Indikator Lainnya	15,52	15,54	15,56	15,58	15,6	15,52	15,53	15,54	15,55	15,57	100%	99,94%	99,87%	99,81%	99,81%
	3.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%		Target Indikator Lainnya	99,96	99,96	99,96	99,96	99,97	99,96	99,98	NA	99,96	98,78	100%	100,02%		100%	98,81%
	4.	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	Target IKK		NA	NA	47,24	57,14	65,5	NA	1,92	1,94	75,64	79,55			4,11%	132,38%	121,45%
	5.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	Target IKK		NA	NA	25,56	51,43	65,7	NA	1,78	1,72	55,55	69,97			6,73%	108,01%	106,50%

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Angka Partisipasi Kasar																		
	6.	a. PAUD (3-6 tahun)	%	Target IKK		81	81,5	81,6	81,7	81,75	83,01	71,33	58,03	124,2	97,57	102,48%	87,52%	71,12%	152,02%	119,35%
	7.	b. SD/MI	%	Target IKK		100	100	100	100	100	111,67	109,88	103,71	99,45	103,12	111,67%	109,88%	103,71%	99,45%	103,12%
	8.	c. SLTP/MTs	%	Target IKK		100	100	100	100	100	115,59	113,67	98,95	94,5	105,59	115,59%	113,67%	98,95%	94,50%	105,59%
		Angka Partisipasi Murni :																		
	9.	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	Target IKK		90	90	90	90	90	97,66	95,5	90,41	89,89	91,03	108,51%	106,11%	100,46%	99,88%	101,14%
	10.	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Target IKK		80	80	80	80	80	83,80	84,51	73,11	83,41	85,18	104,75%	105,64%	91,39%	104,26%	106,48%
		Angka Putus Sekolah:																		
	11.	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	Target IKK		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	Target IKK		0,06	0,06	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	66,67%	33,33%	25,00%	33,33%	33,33%
		Angka Kelulusan:																		
	13.	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	Target IKK		100	100	100	100	100	99,44	98,73	97,22	98,87	99,83	99,44%	98,73%	97,22%	98,87%	99,83%
	14.	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	Target IKK		99,9	99,9	99,9	99,9	100	99,94	99,94	100	99,45	100	100,04%	100,04%	100,10%	99,55%	100%
		Angka Melanjutkan (AM):																		
	15.	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	Target IKK		100	100	100	100	100	103,47	103,14	95,05	98,18	102,4	103,47%	103,14%	95,05%	98,18%	102,40%
		Fasilitas Pendidikan:																		
	16.	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	Target IKK		94,92	95	95,5	96	96,5	86,44	84,80	65	86,16	87,76	91,07%	89,26%	68,06%	89,75%	90,94%
	17.	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	Target IKK		98,95	99	99,2	99,3	99,4	92,95	91,62	80	92,47	93	93,94%	92,55%	80,65%	93,12%	93,56%
		Rasio Guru/Murid perkelas Rata-rata																		
	18.	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	Target IKK		01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	100%	100%	100%	100%	100%
	19.	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	Target IKK		01:20 :32	01:20:32	01:20:32	01:20 :32	01:20 :32	01:19 :10	01:20 :32	01:20 :32	01:20 :32	01:18 :28	98,30%	100%	100%	100%	97,43%

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	20.	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	Rasio	Target IKK		01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:15	100%	100%	100%	100%	97,40 %
	21.	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	Rasio	Target IKK		01:17 :30	01:17:3 0	01:17:3 0	01:17 :30	01:17 :30	01:17 :08	01:17 :30	01:17 :30	01:17 :30	01:15 :32	99,52%	100%	100%	100%	97,46 %
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV																		
	22.	a. Jenjang PAUD	%	Target IKK		95	98	98,2	98,4	98,8	72,87	61,88	81,33	81,53	62,77	76,71%	63,14 %	82,82 %	82,86 %	63,53 %
	23.	b. Jenjang SD/MI	%	Target IKK		100	100	98	99	100	96,43	90,24	93,33	96	96,83	96,43%	90,24 %	95,23 %	96,97 %	96,83 %
	24.	c. Jenjang SMP/MTs	%	Target IKK		100	100	99	100	100	96,95	86,37	88,57	96,55	96,21	96,95%	86,37 %	89,46 %	96,55 %	96,21 %
III	Indikator SPM																			
	1.	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	Target IKK		100	100	100	100	100	86,5	107,9 7	89,53	100	97,75	86,50%	107,9 7%	89,53 %	100%	97,75 %
	2.	a.Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	Target IKK		100	100	100	100	100	NA	95,59	103,4 5	100	101,5		95,59 %	103,4 5%	100%	101,50 %
	3.	b.Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	Target IKK		100	100	100	100	100	NA	95,51	95,59	100	99,5		95,51 %	95,59 %	100%	99,50 %
	4.	c.Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	Target IKK		100	100	100	100	100	NA	26,22	84,12	100	83,58		26,22 %	84,12 %	100%	83,58 %

Sumber: LKjIP, LKPJ Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2020-2024

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pendidikan. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pendidikan. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS PENDIDIKAN	NA	1.088.877.448.112	1.115.069.019.883	1.165.494.284.906	1.209.001.575.864	NA	1.010.223.853.237	1.060.281.914.698	1.128.433.186.504	1.176.470.608.864	NA	92,78%	95,59%	96,82%	97,31%	3,55%	5,21%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NA	671.351.494.413	701.264.939.935	755.425.239.733	832.547.588.231	NA	622.680.071.346	676.757.496.281	739.729.310.332	814.509.981.965	NA	92,76%	96,51%	96,82%	97,83%	7,46%	9,37%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	790.000.000	298.518.171	74.000.000	120.000.000	NA	573.105.600	234.706.500	73.596.710	95.069.600	NA	72,55%	78,62%	99,46%	79,22%	-25,09%	-32,84%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	715.000.000	224.125.000	10.000.000	39.000.000	NA	511.138.800	164.278.800	9.822.260	38.003.000	NA	71,49%	73,30%	98,22%	97,44%	41,94%	41,68%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	12.500.000	16.000.000	15.000.000	12.000.000	NA	12.195.000	13.795.700	14.999.790	5.409.900	NA	97,56%	86,22%	100%	45,08%	0,58%	-14,03%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	12.500.000	16.000.000	15.000.000	12.000.000	NA	12.072.500	15.000.500	14.905.810	5.008.900	NA	96,58%	93,75%	99,37%	41,74%	0,58%	-14,26%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	NA	15.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	NA	11.464.000	11.621.000	9.955.170	5.409.500	NA	76,43%	96,84%	99,55%	54,10%	-12,22%	-19,54%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	NA	15.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	NA	10.717.500	11.810.300	9.987.160	5.508.900	NA	71,45%	98,42%	99,87%	55,09%	-12,22%	-16,69%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	10.000.000	10.027.443	8.000.000	8.000.000	NA	5.749.050	9.970.700	7.999.120	7.999.400	NA	57.49%	99,43%	99,99%	99,99%	-6,65%	17,89%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	10.000.000	8.365.728	6.000.000	29.000.000	NA	9.768.750	8.229.500	5.927.400	27.730.000	NA	97,69%	98,37%	98,79%	95,62%	112,90%	108,03%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NA	645.248.997.518	679.140.380.018	729.390.034.687	805.249.918.353	NA	605.684.867.267	657.096.209.215	714.525.563.790	788.377.938.805	NA	93,87%	96,75%	97,96%	97,90%	7,68%	9,19%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	NA	640.120.872.518	673.843.156.018	724.223.602.447	799.104.314.449	NA	600.977.956.465	652.314.943.257	709.654.065.080	782.521.204.985	NA	93,89%	96,81%	97,99%	97,92%	7,69%	9,20%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	5.063.925.000	5.256.424.000	5.139.032.240	6.115.603.904	NA	4.649.212.302	4.740.466.558	4.844.203.860	5.832.344.320	NA	91,81%	90,18%	94,26%	95,37%	6,86%	8,18%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	26.000.000	20.400.000	10.000.000	10.000.000	NA	25.916.000	20.399.900	9.900.750	4.788.500	NA	99.68%	100%	99,01%	47,89%	-24,17%	-41,46%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	NA	28.000.000	20.400.000	17.400.000	20.000.000	NA	25.285.500	20.399.500	17.394.100	19.601.000	NA	90.31%	100%	99,97%	98,01%	-8,97%	-7,12%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	NA	10.200.000	NA	NA	NA	NA	6.497.000	NA	NA	NA	NA	63.70%	NA	NA	NA	-100%	-100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	NA	50.000.000	32.000.000	505.520.000	398.835.860	NA	35.931.500	30.755.000	499.901.500	396.678.200	NA	71,86%	96,11%	96,11%	99,46%	474,22%	496,79%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	50.000.000	32.000.000	505.520.000	398.835.860	NA	35.931.500	30.755.000	499.901.500	396.678.200	NA	71.86%	96,11%	98,89%	99,46%	474,22%	496,79%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	NA	4.452.425.322	2.341.394.029	4.355.164.221	2.564.046.481	NA	3.003.506.416	1.852.940.460	3.870.939.559	2.447.325.119	NA	67,46%	79,14%	88,88%	95,45%	-0,84%	11,27%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	97.999.320	190.000.000	160.000.000	139.749.605	NA	66.512.250	79.449.950	126.058.500	139.627.000	NA	67.87%	41,82%	78,79%	99,91%	21,81%	29,63%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	NA	324.999.104	212.423.564	249.201.628	225.000.000	NA	170.282.428	207.866.650	243.381.498	224.947.500	NA	52,39%	97,85%	97,66%	99,98%	-9,01%	10,53%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	NA	309.049.957	226.398.039	2.151.763.000	225.000.000	NA	200.634.870	185.971.200	1.780.017.600	224.856.700	NA	64,92%	82,14%	82,72%	99,94%	244,72%	254,16%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	NA	250.000.430	249.510.903	300.000.000	225.000.000	NA	158.363.750	199.717.775	299.835.989	224.999.760	NA	63,35%	80,04%	99,95%	100%	-1,65%	17,09%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	699.990.500	263.000.000	100.568.000	85.568.000	NA	147.353.599	176.513.347	76.751.216	68.468.100	NA	21,05%	67,12%	76,32%	80,02%	-46,37%	-15,84%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	740.574.376	588.058.108	1.089.989.715	1.150.000.000	NA	462.671.519	577.171.538	1.061.644.756	1.132.100.859	NA	62,47%	98,15%	97,40%	98,44%	23,42%	38,44%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	2.029.811.635	612.003.415	303.641.878	513.728.876	NA	1.797.688.000	426.250.000	283.250.000	432.325.200	NA	88.56%	69,65%	93,28%	84,15%	-17,02%	-19,07%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	626.114.690	387.669.235	441.243.622	438.142.732	NA	583.985.000	360.922.000	409.172.978	392.458.500	NA	93.27%	93,10%	92,73%	89,57%	-8,32%	-9,64%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	626.114.690	387.669.235	441.243.622	438.142.732	NA	583.985.000	360.922.000	409.172.978	392.458.500	NA	93.27%	93,10%	92,73%	89,57%	-8,32%	-9,64%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	17.988.437.103	16.713.661.686	18.155.530.326	21.536.563.526	NA	11.518.650.705	15.251.913.207	17.916.007.660	20.570.725.561	NA	64,03%	91,25%	98,68%	95,52%	6,72%	21,57%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	17.514.037.103	15.850.901.686	17.418.912.336	20.646.993.887	NA	11.123.312.070	14.545.046.207	17.306.357.230	19.721.280.843	NA	63,51%	91,76%	99,35%	95,52%	6,31%	21,23%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	NA	NA	30.594.500	NA	NA	NA	NA	30.230.000	NA	NA	NA	NA	98,81%	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	474.400.000	862.760.000	736.617.990	858.975.139	NA	395.338.635	706.867.000	609.650.430	819.214.718	NA	83,33%	81,93%	82,76%	95,37%	27,95%	33,14%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	2.195.519.780	2.351.316.796	2.503.746.877	2.240.081.279	NA	1.315.956.358	1.930.049.899	2.434.128.135	2.229.786.180	NA	59.94%	82,08%	97,22%	99,54%	1,02%	21,46%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	NA	214.350.000	214.400.000	194.863.630	214.400.000	NA	152.514.538	188.490.208	194.863.630	214.350.000	NA	71.15%	87,92%	100%	99,98%	0,31%	12,32%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	860.960.000	896.000.000	896.089.341	755.738.000	NA	494.445.550	667.097.100	896.019.341	755.684.070	NA	57.43%	74,45%	99,99%	99,99%	-3,86%	17,86%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	361.901.250	604.036.578	831.356.077	804.943.279	NA	242.141.700	594.707.541	809.393.489	795.852.210	NA	66.91%	98,46%	97,36%	98,87%	33,79%	60,01%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	695.810.930	541.880.218	461.437.829	385.000.000	NA	387.386.070	402.100.650	446.387.150	384.275.900	NA	55.67%	74,20%	97,74%	99,81%	-17,84%	0,30%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	62.497.600	95.000.000	120.000.000	80.000.000	NA	39.468.500	77.654.400	87.464.525	79.624.000	NA	63.15%	81,74%	72,89%	99,53%	15,00%	33,47%
Program Pengelolaan Pendidikan	NA	416.231.120.697	315.548.846.758	338.964.456.876	306.074.277.780	NA	382.480.806.474	295.159.376.176	322.208.101.300	297.395.874.240	NA	91,89%	93,54%	95,06%	97,16%	-8,82%	-7,12%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	NA	255.333.224.189	177.227.126.765	171.562.726.840	154.849.926.700	NA	242.788.771.068	165.502.056.203	169.214.350.693	151.846.716.867	NA	95,09%	93,38%	98,63%	98,06%	-14,51%	-13,28%
Pembangunan Unit Sekolah Baru USB	NA	10.800.399.796	6.000.000.000	NA	302.418.300	NA	8.839.398.084	4.800.240.558	NA	299.826.049	NA	81,84%	80.00%	NA	99,14%	-72,22%	-72,85%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	NA	299.999.943	160.737.000	NA	185.667.470	NA	285.148.500	158.484.500	NA	183.501.219	NA	95,05%	98.60%	NA	98,83%	-73,21%	-72,21%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	NA	189.084.665	61.484.178	NA	350.000.000	NA	160.720.447	559.978.738	NA	348.714.123	NA	85%	91.08%	NA	99,63%	-83,74%	74,21%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	NA	1.999.999.974	1.175.540.281	1.559.377.000	1.843.918.300	NA	1.971.912.000	1.157.302.195	1.534.381.687	1.820.223.044	NA	98,60%	98,45%	98,40%	98,71%	3,23%	3,30%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	NA	493.745.879	150.000.000	200.000.000	285.806.100	NA	462.636.000	147.699.500	197.493.725	282.590.215	NA	93,70%	98,47%	98,75%	98,87%	2,21%	2,91%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	NA	323.511.038	150.000.000	485.749.000	75.806.100	NA	318.225.750	144.200.450	483.832.194	74.954.000	NA	98,37%	96,13%	99,61%	98,88%	28,60%	32,11%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	NA	4.195.140.805	11.621.266.076	3.009.839.840	2.525.529.070	NA	3.893.480.168	11.522.850.510	2.977.890.900	2.447.690.812	NA	92,81%	99,15%	98,94%	96,92%	28,94%	34,66%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	NA	10.656.000.000	13.250.000.000	13.996.300.000	13.718.700.000	NA	10.287.540.000	12.761.150.580	13.741.930.720	13.313.932.273	NA	96,54%	96,31%	98,18%	97,05%	9,33%	9,54%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	NA	4.488.778.800	2.102.400	100.000.000	100.000.000	NA	0	0	99.775.000	93.000.000	NA	0%	0%	99.78%	93,00%	1518,84%	-6,79%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	NA	1.152.159.816	693.175.800	826.800.000	950.000.000	NA	1.080.477.000	691.733.010	822.792.010	920.237.430	NA	93,78%	99,79%	99,52%	96,87%	-1,89%	-1,73%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	NA	110.978.700.000	206.238.200	293.080.000	1.022.800.000	NA	109.308.743.901	160.065.464	191.231.000	794.861.100	NA	98.50%	77,61%	65,25%	77,71%	63,76%	78,42%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	NA	600.000.000	755.000.000	750.000.000	750.000.000	NA	590.400.000	742.830.100	750.000.000	750.000.000	NA	98,40%	98,39%	100%	100%	8,39%	8,93%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	NA	83.734.179.826	123.713.700.000	117.234.900.000	116.908.120.000	NA	83.489.757.918	115.474.611.532	116.796.163.932	116.652.372.776	NA	99,71%	92,49%	99,63%	99,78%	14,08%	13,11%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	NA	224.999.849	345.942.825	274.600.000	265.000.000	NA	202.728.800	345.858.140	273.171.000	261.316.300	NA	90.10%	99,98%	99,48%	98,61%	9,88%	15,08%
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	NA	NA	594.000.000	NA	520.000.000	NA	NA	460.202.026	NA	435.969.300	NA	NA	77,48%	NA	83,84%	-100%	-100%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	NA	3.220.000.000	5.255.371.600	2.373.917.000	4.716.067.360	NA	2.443.668.809	4.454.807.527	2.199.473.558	4.149.607.970	NA	75,89%	84,77%	92,65%	87,99%	35,68%	40,11%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	NA	5.832.517.727	2.000.000.000	2.836.900.000	2.551.612.200	NA	5.629.816.212	1.964.067.650	2.836.735.000	2.549.410.500	NA	96.52%	98,20%	99,99%	99,91%	-11,31%	-10,27%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	NA	1.198.482.379	750.000.000	769.400.000	800.000.000	NA	689.464.850	657.294.695	639.256.500	630.598.200	NA	57,53%	87,64%	83,19%	78,82%	-10,29%	-2,92%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	NA	11.386.876.775	7.653.874.800	6.127.364.000	6.978.481.800	NA	9.703.280.129	7.277.075.768	5.734.627.517	5.837.911.556	NA	85,21%	95,08%	93.59%	83,66%	-12,95%	-14,80%
Pengadaan Mebel Sekolah	NA	1.523.717.142	903.409.001	20.112.000.000	NA	NA	1.454.333.000	868.617.075	19.339.601.250	NA	NA	95,45%	96,15%	96,16%	NA	661,84%	662,07%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	NA	1.519.999.775	700.000.000	613.500.000	NA	NA	1.465.324.500	681.070.000	505.994.700	NA	NA	96.40%	97,30%	97,15%	NA	-55,43%	-59,74%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	NA	514.930.000	200.000.000	NA	NA	NA	511.715.000	197.280.000	NA	NA	NA	99,38%	98,64%	NA	NA	-80,58%	-80,72%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	NA	111.942.483.918	99.919.714.118	121.779.777.506	106.165.721.080	NA	107.010.796.350	93.880.261.554	109.553.441.743	102.627.094.900	NA	95.59%	93,96%	89,96%	96,67%	-0,56%	-0,63%
Pembangunan Unit Sekolah Baru USB	NA	NA	NA	10.601.862.137	300.000.000	NA	NA	NA	8.357.128.570	288.798.900	NA	NA	NA	78,83%	96,27%	-97,17%	-96,54%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	NA	NA	NA	217.881.000	312.066.000	NA	NA	NA	217.069.312	310.105.457	NA	NA	NA	99,63%	99,37%	43,23%	42,86%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	NA	230.000.000	NA	NA	60.000.000	NA	230.000.000	NA	NA	60.000.000	NA	100%	NA	NA	100%	-100%	-100%
Pembangunan Laboratorium	NA	100.000.000	130.000.000	NA	530.126.000	NA	100.000.000	130.000.000	NA	465.380.677	NA	100%	100%	NA	87,79%	-35,00%	-35,00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	NA	35.000.000	2.972.468.000	1.655.240.000	330.545.000	NA	35.000.000	2.443.570.311	1.394.255.470	284.274.215	NA	100%	82,21%	84,23%	86,00%	2756,14%	2253,03%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	NA	6.999.307.443	4.150.000.000	240.000.000	1.420.000.000	NA	5.555.004.887	3.106.258.964	239.224.116	1.233.957.177	NA	79,37%	74,85%	99,68%	86,90%	118,91%	93,15%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	NA	2.237.598.273	1.238.500.000	1.831.669.829	2.843.000.000	NA	2.237.347.750	1.234.864.248	1.808.056.243	2.799.363.371	NA	99.99%	99,71%	98,71%	98,47%	19,49%	18,81%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	NA	3.636.902.028	542.500.000	4.285.079.000	420.000.000	NA	3.531.263.600	502.366.150	4.219.596.000	395.167.500	NA	97,10%	92,60%	98,47%	94,09%	171,53%	187,85%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	NA	6.317.851.480	8.699.100.000	13.327.384.756	12.105.000.000	NA	5.614.791.950	8.211.156.900	12.198.468.000	12.066.204.500	NA	88.87%	94,39%	91,53	99,68%	27,24%	31,24%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	NA	NA	280.984.167	NA	227.700.000	NA	NA	183.940.000	NA	222.000.000	NA	NA	65,46%	NA	97,50%	-100%	-100%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	NA	1.250.393.360	500.000.000	825.569.278	951.000.000	NA	1.117.070.360	415.930.000	815.590.000	885.350.950	NA	89,34%	83,19%	98,79%	93,10%	6,76%	13,96%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	NA	40.355.379.000	151.978.200	169.727.720	300.000.000	NA	39.614.574.263	117.434.000	111.803.999	180.335.790	NA	98.16%	77,27%	65,87%	60,11%	-3,73%	-14,40%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	NA	299.999.836	NA	86.042.560	50.000.000	NA	109.907.060	NA	28.735.000	46.903.000	NA	36,64%	NA	33,40%	93,81%	-70,94%	-18,39%
Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	NA	39.292.434.231	70.480.700.000	70.124.500.000	71.760.400.000	NA	39.139.294.787	69.154.905.410	69.806.744.200	71.394.927.537	NA	99,61%	99,73%	99,55%	99,49%	27,07%	26,64%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	NA	164.148.520	295.000.000	172.254.848	317.000.000	NA	102.438.560	287.007.900	158.355.250	293.001.000	NA	62.41%	97,29%	91,93%	92,43%	40,71%	73,46%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	NA	599.999.655	576.500.000	1.158.678.630	1.500.000.000	NA	341.204.300	459.048.300	978.482.700	1.230.726.900	NA	56,87%	79,63%	84,45%	82,05%	42,18%	57,82%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	NA	5.349.999.843	8.257.483.751	15.605.823.748	12.488.884.080	NA	4.231.350.119	6.059.064.677	7.793.767.964	10.236.297.926	NA	79,09%	73,38%	49,94%	81,96%	41,12%	34,39%
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	NA	NA	144.500.000		250.000.000	NA	NA	129.098.356		234.300.000	NA	NA	89,34%		93,72%	-100%	-100%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	NA	1.989.977.475	950.000.000	990.000.000	NA	NA	1.968.056.030	928.477.878	946.314.545	NA	NA	98.90%	97,73%	95,59%	NA	-49,35%	-50,30%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	NA	443.661.565	NA	NA	NA	NA	443.661.475	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	-100%	-100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	NA	2.639.831.209	NA	NA	NA	NA	2.639.831.209	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	-100%	-100%
Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula	NA	NA	250.000.000	NA	NA	NA	NA	250.000.000	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	-100%	-100%
Pengadaan Mebel Sekolah	NA	NA	300.000.000	338.064.000	NA	NA	NA	267.138.460	331.449.120	NA	NA	NA	89,05%	98,04%	NA	-43,66%	-37,96%
Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	NA	NA	NA	150.000.000	NA	NA	NA	NA	148.401.254	NA	NA	NA	NA	98,93%	NA	-100%	-100%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	NA	41.399.850.113	32.370.413.101	39.587.874.643	36.580.490.000	NA	32.436.701.464	30.406.836.216	37.862.418.315	35.196.695.097	NA	78,35%	93,93%	95,64%	96,23%	-2,37%	3,74%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	NA	590.000.000	1.000.383.000	717.441.000	270.140.000	NA	583.096.200	837.774.523	710.159.693	268.656.732	NA	98,83%	83,75%	98,99%	99,45%	-7,02%	-11,24%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	NA	446.476.173	200.000.000	295.000.000	275.000.000	NA	445.594.868	197.472.000	292.269.134	75.000.000	NA	99.80%	98,74%	99,07%	27,27%	-4,83%	-27,34%
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	NA	300.000.000	364.442.505	280.000.000	594.100.000	NA	285.498.195	343.959.387	267.675.000	540.901.306	NA	95.17%	94,38%	95,60%	91,05%	36,83%	33,46%
Pengadaan Mebel PAUD	NA	300.000.030	396.000.000	1.013.000.000	120.000.000	NA	282.260.000	391.400.180	959.109.500	103.695.000	NA	94,09%	98,84%	94,68%	86,41%	33,22%	31,51%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	NA	362.318.032	446.897.900	444.975.840	210.000.000	NA	328.463.900	365.339.100	429.109.400	206.460.000	NA	90,66%	81,75%	96,43%	98,31%	-9,96%	-7,73%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	NA	1.268.800.012	2.515.000.000	2.639.765.000	3.034.000.000	NA	1.104.607.000	2.323.708.110	2.498.819.878	2.925.852.252	NA	87,06%	92,39%	94,66%	96,64%	39,37%	45,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	NA	156.424.830	230.000.000	150.000.000	281.250.000	NA	148.565.000	225.373.500	147.316.050	253.206.468	NA	94,98%	97,99%	98,21%	90,03%	33,25%	29,65%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	NA	285.304.445	625.000.000	697.133.333	935.000.000	NA	212.495.300	543.414.915	555.746.070	841.735.470	NA	74,48%	86,95%	79,72%	90,03%	54,91%	69,82%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	NA	1.034.572.518	175.000.000	200.000.000	200.000.000	NA	927.742.471	158.766.000	134.860.000	126.789.000	NA	89.67%	90,72%	67,43%	63,39%	-22,93%	-34,64%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	NA	245.108.512	179.729.596	194.000.000	300.000.000	NA	205.995.500	151.609.500	147.663.350	193.977.000	NA	84,04%	84,35%	76,12%	64,66%	11,97%	0,79%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	NA	29.523.000.000	24.247.200.000	26.880.000.000	28.070.850.000	NA	22.652.946.859	23.140.601.148	26.741.082.037	27.730.147.164	NA	76,73%	84,82%	99,48%	98,79%	-0,86%	7,14%
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	NA	NA	NA	NA	2.176.200.000	NA	NA	NA	NA	1.819.135.895	NA	NA	NA	NA	83,59%	-	-
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	NA	NA	NA	NA	113.950.000	NA	NA	NA	NA	111.138.810	NA	NA	NA	NA	97,53%	-	-
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	NA	6.287.845.561	1.516.000.000	5.659.012.500	NA	NA	4.830.728.196	1.263.463.483	4.563.181.747	NA	NA	76,83%	83,34%	80,64%	NA	32,47%	29,11%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	NA	600.000.000	393.360.100	417.546.970	NA	NA	428.707.975	385.493.370	415.426.456	NA	NA	71,45%	98,00%	99,49%	NA	-42,76%	-34,11%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	NA	7.555.562.477	6.031.592.774	6.034.077.887	8.478.140.000	NA	4.588.617.959	5.370.222.203	5.577.890.549	7.719.275.326	NA	60,73%	89,03%	92,44%	91,05%	6,79%	19,76%
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	NA	NA	NA	NA	700.000.000	NA	NA	NA	NA	539.098.794	NA	NA	NA	NA	77,01%	-	-
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	NA	100.000.096	88.193.550	61.400.000	40.000.000	NA	25.475.000	38.429.500	39.179.500	33.924.000	NA	25,47%	43,57%	63,81%	84,81%	-25,68%	13,13%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	NA	55.986.383	4.399.350	91.877.887	38.500.000	NA	49.620.000	3.805.500	84.816.550	17.852.400	NA	88,63%	86,50%	92,31%	46,37%	612,73%	652,50%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	NA	534.066.855	100.000.000	75.000.000	75.000.000	NA	375.263.000	38.190.000	26.699.750	58.021.500	NA	70.27%	38,19%	35,60%	77,36%	-35,43%	-0,87%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	NA	NA	223.799.874	166.000.000	150.000.000	NA	NA	178.171.305	120.196.140	114.732.500	NA	NA	79,61%	72,41%	76,49%	-17,73%	-18,54%
Pengelolaan Dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	NA	5.697.800.000	4.812.000.000	5.403.800.000	6.993.040.000	NA	3.013.633.000	4.334.060.408	5.108.194.899	6.513.456.733	NA	52,89%	90,07%	94,53%	93,14%	8,72%	29,73%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	NA	214.507.960	53.200.000	50.000.000	61.500.000	NA	206.165.750	50.467.200	48.541.300	59.898.111	NA	96,11%	94,86%	97,08%	97,40%	-19,40%	-18,65%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	NA	145.787.168	200.000.000	186.000.000	175.000.000	NA	113.934.200	182.958.800	150.262.410	142.203.950	NA	78,15%	91,48%	80,79%	81,26%	8,09%	12,45%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	NA	NA	NA	NA	245.100.000	NA	NA	NA	NA	240.087.338	NA	NA	NA	NA	97,95%	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	NA	40.000.000	NA	NA	NA	NA	39.702.124	NA	NA	NA	NA	99.26%	NA	NA	NA	-100%	-100%
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	NA	46.689.130	100.000.000	NA	NA	NA	44.260.000	96.889.240	NA	NA	NA	94,80%	96,89%	NA	NA	7,09%	9,45%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	NA	313.478.658	225.000.000	NA	NA	NA	313.398.658	223.257.550	NA	NA	NA	99.97%	99,23%	NA	NA	-64,11%	-64,38%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	NA	407.246.227	225.000.000	NA	NA	NA	407.166.227	223.992.700	NA	NA	NA	99.98%	99,55%	NA	NA	-72,38%	-72,49%
Program Pengembangan Kurikulum	NA	274.234.359	631.760.000	361.945.000	585.000.000	NA	196.642.050	506.424.050	318.555.530	336.585.080	NA	71.71%	80,16%	88,01	57,54%	49,76%	42,03%
Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	NA	0	231.360.000	50.000.000	200.000.000	NA	0	168.609.200	35.698.000	159.373.000	NA	0	72,88%	71,4	79,69%	110,81%	133,81%
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	NA	NA	NA	50.000.000	50.000.000	NA	NA	NA	35.698.000	37.113.500	NA	NA	NA	71,4	74,23%	0,00%	3,97%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	NA	NA	NA	NA	150.000.000	NA	NA	NA	NA	122.259.500	NA	NA	NA	NA	81,51%	-	-
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	NA	NA	231.360.000	NA	NA	NA	NA	168.609.200	NA	NA	NA	NA	72,88%	NA	NA	-100,00%	-100,00%
Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	NA	274.234.359	400.400.000	311.945.000	385.000.000	NA	196.642.050	337.814.850	282.857.530	177.212.080	NA	71.71%	84,37%	90,68%	46,03%	15,78%	6,06%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	NA	149.234.359	100.000.000	70.470.000	60.000.000	NA	116.393.250	93.396.160	62.999.660	34.397.000	NA	77,99%	93,40%	89,40%	57,33%	-25,79%	-32,57%
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	NA	NA	NA	58.275.000	150.000.000	NA	NA	NA	58.275.000	0	NA	NA	NA	100%	0,00%	157,40%	-100,00%
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	NA	125.000.000	300.400.000	183.200.000	175.000.000	NA	80.248.800	244.418.690	161.582.870	142.815.080	NA	64,20%	81,36%	88,20%	81,61%	32,28%	53,02%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	NA	500.000.000	97.188.473.195	70.350.343.297	69.474.709.853	NA	290.553.000	*87.550.805.376*	65.924.446.242	64.005.395.229	NA	58,11%	*90,08%*	93,71%	92,13%	32,28%	53,02%
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	NA	500.000.000	97.188.473.195	70.350.343.297	69.474.709.853	NA	290.553.000	*87.550.805.376*	65.924.446.242	64.005.395.229	NA	58.11%	*90,08%*	93,71%	92,13%	6436,28%	10001,62%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	NA	500.000.000	93.929.183.195	66.645.343.297	64.590.709.853	NA	290.553.000	85.331.710.375	62.574.014.992	59.584.721.210	NA	58.11%	90,85%	93,89%	92,25%	6436,28%	10001,62%
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	NA	NA	3.259.290.000	3.705.000.000	4.884.000.000	NA	NA	2.219.095.001	3.350.431.250	4.420.674.019	NA	NA	68,09%	90,43%	90,51%	6217,90%	9745,76%
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	NA	520.598.643	435.000.000	392.300.000	320.000.000	NA	192.768.500	307.812.815	252.773.100	228.864.400	NA	37,03%	70,76%	64,43%	71,52%	22,75%	41,46%
Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	NA	195.598.925	110.000.000	101.700.000	70.000.000	NA	240.000	29.378.175	13.355.000	38.380.900	NA	0.12%	26,71%	13,13%	54,83%	-14,90%	10,78%
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	NA	164.998.925	10.000.000	101.700.000	50.000.000	NA	240.000	7.821.100	13.355.000	23.475.000	NA	0.15%	78,21%	13,13%	46,95%	-27,49%	4091,25%
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	NA	30.600.000	100.000.000	NA	20.000.000	NA	0	21.557.075	NA	14.905.900	NA	0.00%	21,56%	NA	74,53%	257,41%	1101,77%
Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	NA	324.999.718	325.000.000	290.600.000	250.000.000	NA	192.528.500	278.434.640	239.418.100	190.483.500	NA	59,24%	85,67%	82,39%	76,19%	63,40%	-100%
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	NA	149.999.987	200.000.000	197.000.000	150.000.000	NA	74.807.000	177.414.440	157.651.700	109.727.500	NA	49.87%	88,71%	80,03%	73,15%	-8,19%	3,39%
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	NA	74.999.800	125.000.000	93.600.000	100.000.000	NA	37.870.000	101.020.200	81.766.400	80.756.000	NA	50,49%	80,82%	87,36%	80,76%	2,66%	31,87%
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	NA	99.999.931	NA	NA	NA	NA	79.851.500	NA	NA	NA	NA	79,85%	NA	NA	NA	16,13%	48,82%

Sumber: LKPJ Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2020-2024

c. Mitra Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam Pemberian Pelayanan.

Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menjalankan tugas pokok fungsinya di bidang pendidikan juga bekerjasama dengan pihak lain, baik dengan perangkat daerah maupun dengan mitra lainnya.

Dinas Pendidikan Kota Semarang bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta OPD lainya , selain stakeholder seperti Tanoto Foundation, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata baik di bidang sarana prasarana, pengembangan SDM guru dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kualitas mutu pendidikannya.

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja perangkat Daerah.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga memperoleh dukungan dari unsur lain, baik dari BUMD maupun BUMN, seperti Bank Jateng dan bank lainnya di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terutama dalam pemberian bantuan pendidikan kepada siswa, baik berupa Simpanan Pelajar, perlengkapan sekolah maupun bantuan lainnya untuk satuan pendidikan.

e. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Untuk menjalankan fungsinya supaya dapat memwujudkan kualitas pendidikan yang lebih bermutu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga melakukan kerjasama dengan daerah lain maupun instansi lainnya. Beberapa daerah serta instansi yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang antara lain adalah Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah terkait penjaminan mutu pendidikan, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) terkait pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, beberapa perguruan tinggi seperti UNNES, UNIVET, UDINUS dalam hal pengembangan kurikulum, teknologi serta pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta dengan beberapa kota/kabupaten seperti Kota Bandung, Kota Surabaya, Kedungsepur (Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Demak dan Purwodadi).

f. Inovasi Perangkat Daerah.

Inovasi merupakan sesuatu yang bisa menjadikan perangkat daerah berkembang. Di Dinas Pendidikan Kota Semarang saat ini terdapat beberapa inovasi yang sudah berjalan dan sedang dalam pengembangan, antara lain Geber Septi untuk penanganan kekerasan dan bullying di lingkungan pendidikan, Gerbang Harapan untuk membantu siswa miskin mendapatkan orangtua asuh, Bambu Apus untuk menangani anak putus sekolah, Pemuda Hebat untuk mengakses mutu pendidikan, Si Manggis terkait Program Makan Bergizi Gratis, serta aplikasi dan inovasi lainnya yang tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan ke depannya.

g. Penghargaan Perangkat Daerah.

Dinas Pendidikan Kota Semarang telah menerima beberapa penghargaan antara lain:

1. Penghargaan sebagai Instansi Pemerintah Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

2. Penghargaan Apresiasi Performance Insipiratif Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Kategori Media Sosial;
3. Juara Terbanyak pada Jambore GTK Hebat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
4. Juara Umum Jambore Pendidikan Kesetaraan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (PKBM Eagle School);
5. Juara 1 Marching Band Field Show Display Klasemen Junior Non Brass Tingkat Nasional Tahun 2024 (SDN Ngaliyan 01).

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun;
2. Kesenjangan akses pendidikan pada mutu dan kualitas pendidikan di sekolah maupun akses pendidikan bagi kelompok rentan (disabilitas, miskin, dan daerah marginal);
3. Masih adanya penduduk yang belum bersekolah (anak tidak sekolah) maupun tidak menyelesaikan (anak putus sekolah) pendidikan dasar sesuai dengan jenjang usia pendidikan;
4. Transformasi digital pendidikan dikarenakan kurangnya sarana prasarana penunjang teknologi dan adanya kesulitan
5. Kompetensi guru dan tenaga pendidik bagi kualitas pendidikan di Kota Semarang

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Pendidikan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan wajib belajar 13 tahun;
2. Komitmen pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan akses pendidikan pada mutu dan kulaitas pendidikan secara menyeluruh dan layanan pembangunan pada sektor pendidikan dasar;
3. Akses yang lebih luas terhadap sumber pengetahuan di era digital saat ini;
4. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan bagi anak usia sekolah;
5. Kerjasama pendidikan baik dengan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain terkait; serta
6. Adanya kontribusi nyata dari berbagai pihak terhadap pendidikan, seperti beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pendidikan, telahaan tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Pada Dinas Pendidikan serta setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pendidikan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu: "Belum optimalnya kualitas pendidikan di Kota Semarang" yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
"Belum optimalnya kualitas pendidikan di Kota Semarang"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang masuk dalam jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada pendidikan nonformal/kesetaraan	1. Belum meratanya sarana dan prasarana di jenjang PAUD dan pendidikan kesetaraan
		2. Belum optimalnya implementasi kurikulum dalam pendidikan PAUD dan PNF
		3. Masih cukup tingginya anak usia sekolah yang belum pernah bersekolah
2	Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang masuk dalam pendidikan sekolah dasar	1. Belum meratanya sarana dan prasarana di jenjang sekolah dasar
		2. Belum optimalnya tingkat ketercapaian literasi dan numerasi di jenjang sekolah dasar
		3. Masih terdapat anak tidak sekolah (ATS) di jenjang sekolah dasar
3	Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang masuk dalam pendidikan sekolah menengah pertama	1. Belum meratanya sarana dan prasarana di jenjang sekolah menengah pertama
		2. Belum optimalnya tingkat ketercapaian literasi dan numerasi di jenjang menengah pertama
		3. Masih terdapat anak tidak sekolah (ATS) di jenjang sekolah menengah pertama
4	Belum terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang	1. Masih belum meratanya ketersediaan guru dan tenaga kependidikan
		2. Masih adanya pendidik PAUD yang belum berpendidikan D-IV/S1
		3. Masih adanya pendidik yang belum bersertifikasi pendidik
		4. Belum optimalnya jumlah pendidik yang sesuai dengan disiplin ilmunya
5	Belum optimalnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pendidikan	1. Belum optimalnya manajemen kinerja pegawai
		2. Belum tersedianya database pendidikan yang akurat dan tepat
		3. Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dan anggaran

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan di Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belum meratanya sarana dan prasarana pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar. Sarana dan prasarana sekolah masih belum

memadai sebagai penunjang pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar terutama di Sekolah Dasar (SD) masih banyak ruang kelas yang harus di rehabilitasi karena kerusakan berat sehingga sekolah harus memanfaatkan ruang ruang lain sebagai kelas. Hal ini disebabkan banyaknya sekolah terutama negeri di Kota Semarang yang sudah berdiri sejak tahun 1980an sehingga membutuhkan pemeliharaan dan rehabilitasi menyeluruh. Sedangkan untuk jenjang PAUD, Kota Semarang masih memiliki 13 TK negeri yang aktif, sehingga masih terdapat kekurangan di berbagai wilayah kecamatan. Hal ini disebabkan susahnya lahan yang bisa dipergunakan untuk membangun TK Negeri baru.

2. Belum optimalnya ketercapaian implementasi kurikulum dalam pendidikan pada pendidikan PAUD dan PNF/Kesetaraan. Dalam ketercapaian implementasi kurikulum masih belum maksimal karena masih perlunya pelatihan dan sosialisasi bagi pendidik dan kepala sekolah PAUD serta masih perlunya peningkatan kompetensi pendidik menjadi minimal berpendidikan D-4/S-1.
3. Belum optimalnya tingkat ketercapaian literasi dan numerasi di jenjang SD dan SMP.
4. Masih adanya anak tidak sekolah (ATS) di jenjang PAUD, SD dan SMP.
5. Belum meratanya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Masih adanya pendidik yang belum berpendidikan D-4/S1 dan bersertifikat pendidik terutama di PAUD dan SD.
7. Masih adanya pendidik yang belum sesuai dengan disiplin ilmunya terutama di pendidikan PAUD dan PNF/Kesetaraan.
8. Belum optimalnya manajemen kinerja kepegawaian.
9. Belum tersedianya database pendidikan yang akurat dan tepat.
10. Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dan anggaran.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Delapan prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pendidikan masuk dalam misi presiden di Asta Cita 1, 4 dan 8 yang bermuara untuk Pendidikan yang Bermutu untuk Semua. RPJMN menempatkan pendidikan sebagai prioritas strategis dengan beberapa arah kebijakan utama, yaitu:

1. Wajib belajar 13 tahun (PAUD 1 tahun + pendidikan dasar dan menengah 12 tahun).
2. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui tata kelola dan pengembangan kompetensi.
3. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan termasuk pesantren, madrasah, dan pendidikan inklusif.
4. Penguatan pendidikan tinggi dan vokasi berbasis STEAM (Sains, Teknologi, Engineering, Arts, Matematika).
5. Revitalisasi sarana-prasarana sekolah, madrasah, dan pembangunan sekolah unggul.
6. Penguatan literasi, numerasi, dan karakter, termasuk inovasi berbasis teknologi digital.
7. Intervensi gizi dan kesehatan peserta didik (program makan bergizi gratis).
8. Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator, ditarget naik dari 0,54 (2020) → 0,59 (2029).

Keterkaitan RPJMN terhadap Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang berdasarkan telaah dan kebijakan diatas adalah:

- Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Semarang harus mendukung visi nasional pembangunan SDM unggul.
- Tujuan dan Sasaran Renstra diturunkan dari target nasional, seperti wajib belajar 13 tahun, mutu guru, sekolah unggul, dan pencapaian SPM Pendidikan.

- Program dan Kegiatan Prioritas:
  - Program PAUD dan transisi ke SD.
  - Program pemerataan pendidikan dasar.
  - Program peningkatan mutu guru dan digitalisasi pembelajaran.
  - Program gizi siswa dan UKS.

- Indikator Kinerja: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata lama sekolah, serta kontribusi pada IMM.

Hal ini mempunyai implikasi strategis bagi daerah yaitu:

1. Perlunya sinkronisasi perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan RPJMN untuk menjamin konsistensi pembangunan pendidikan.
2. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20% APBD diarahkan mendukung program prioritas nasional.
3. Program afirmatif bagi daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan untuk mengatasi kesenjangan akses dan mutu pendidikan.
4. Kolaborasi dengan pemerintah pusat (Kemendikdasmen, Kemenag, Bappenas) untuk percepatan target pendidikan

RPJMN 2025–2029 memberikan arah strategis pembangunan pendidikan nasional yang harus diterjemahkan ke dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang. Fokus utamanya adalah peningkatan akses, mutu, pemerataan, dan daya saing pendidikan, sejalan dengan target peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini terdapat program/kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program nasional, seperti dalam pembangunan kependudukan (GDPK) antara lain dengan pembangunan karakter mulai usia dini, perwujudan kesuksesan program wajib belajar 13 tahun dengan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Dalam Renstra ini juga terdapat dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan intervensi gizi antara lain dalam pelaksanaan program stunting, baik berupa pelatihan dan workshop kepada pendidik di jenjang PAUD maupun pemberian edukasi pada peserta didik mulai dari jenjang SMP tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak remaja, termasuk dukungan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta mempersiapkan satuan pendidikan dan juga peserta didik untuk menjadikan MBG ini sebagai pintu masuk untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkarakter terutama dari sisi pola hidup bersih sehat (PHBS)

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan

daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

““KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Untuk mewujudkan visi Kota Semarang tersebut dirumuskan tujuh (7) misi pembangunan daerah sebagai berikut;

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian
Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi
Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak
Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital.
Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan
Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat
Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas

Peningkatan kualitas pendidikan di Kota Semarang diarahkan untuk mendukung misi ke satu (1) yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian” yang bertujuan “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian”.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang pendidikan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata.

Dinas Pendidikan Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dalam mencapai indikator “Indeks Pendidikan”. Indeks Pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pendidikan di suatu daerah. Indeks ini menggambarkan kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat, serta seberapa efektif sistem pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Peningkatan indeks pendidikan dapat mencerminkan kemajuan dalam bidang pendidikan, baik dari segi pemerataan akses,

kualitas pengajaran, hingga tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan jenjang pendidikan. Indeks pendidikan terdiri dari beberapa komponen yang digunakan untuk mengukur kualitas dan aksesibilitas pendidikan di suatu wilayah. Komponen-komponen ini menggambarkan berbagai aspek penting dalam sistem pendidikan yang saling berkaitan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan. Komponen penyusun indeks pendidikan di antaranya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Beberapa program/kegiaatan yang ada dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mendukung pencapaian RLS dan HLS ini antara lain:

- Pemberian bantuan pendidikan, baik berupa hibah, bansos, maupun bentuk bantuan lainnya. Hibah yang diberikan dapat berupa hibah pendampingan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (P-BOSP) satuan pendidikan swasta, hibah untuk rehabilitasi atau pembangunan sarana prasarana satuan pendidikan swasta, hibah lainnya yang sesuai perundang-undangan. Bantuan social yang diberikan dapat berupa beasiswa, sedangkan bantuan pendidikan yang lain dapat berupa perlengkapan sekolah, tabungan (simpanan) pelajar, yang dapat bersumber dari APBD Kota Semarang maupun dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- Pembangunan satuan pendidikan baru, terutama di wilayah-wilayah yang belum terlayani
- Rehabilitasi sarana dan prasarana, baik di satuan pendidikan maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang
- Pemenuhan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi pendidik
- Penanganan anak tidak sekolah (ATS) antara lain dengan pemanfaatan aplikasi serta penguatan Pos Pelayanan Terpadu Standar Pelayanan Minimal yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk pendataan dan pelaporannya sehingga dapat dioptimalkan untuk penanganannya

Dengan meningkatnya RLS dan HLS di Kota Semarang, maka diharapkan Indeks Harmoni terutama dari sisi sosial berupa semakin tingginya pendidikan rata-rata warga Kota Semarang serta mempunyai bekal pendidikan karakter yang kuat dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat Kota Semarang yang harmonis dan sejahtera.

Dinas Pendidikan Kota Semarang juga berperan dalam pembangunan gender melalui berbagai kegiatan yang ada baik di Dinas Pendidikan maupun di satuan pendidikan yang juga di dukung dengan beberapa sub kegiatan pendukungnya, antara lain melalui pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi murid dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan juga mahasiswa perguruan tinggi, hibah Pendampingan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (sekolah swasta gratis), maupun bantuan bagi pendidik PAUD dan PKBM yang bertujuan untuk memberikan keringanan untuk penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua.

Sesuai Visi dan Misi Wali Kota untuk 5 tahun kedepan, nantinya dengan semakin tingginya komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk menciptakan pendidikan yang semakin bermutu, maka anggaran responsive gendernya pun akan meningkat pula.

Dalam mendukung program Kota Layak Anak (KLA), Dinas Pendidikan Kota Semarang akan memastikan semua satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP menerapkan disiplin ketat, jauh dari perundungan, kekerasan, tindak criminal, menciptakan sekolah ramah anak dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukungnya.

Hal ini antara lain diimplementasikan dengan penerapan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, penguatan peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan juga Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), penguatan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung tercapainya pembelajaran yang menyenangkan, serta tentunya pada sub kegiatan pendukung sarana dan prasarana di satuan pendidkan yang ramah anak.

c. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, dengan target utama pemerataan akases dan peningkatan mutu pendidikan. Visi dan misi dari Renstra Kemendikdasmen adalah sebagai berikut:

Visi:

> Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan serta perkembangan global.

Misi:

1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang merata.
2. Meningkatkan mutu pembelajaran berbasis kompetensi abad 21.
3. Menguatkan pendidikan karakter dan profil Pelajar Pancasila.
4. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pendanaan pendidikan.

Isu-isu strategis sebagai pokok permasalahan dijabarkan sebagai penentuan tujuan dan sasaran renstra dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 13 Tahun
2. Mutu Pembelajaran dan Hasil Belajar
3. Kualitas dan Distribusi Guru
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Transformasi Digital Pendidikan
6. Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja
7. Penguatan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila
8. Tata Kelola dan Pendanaan Pendidikan

Dengan adanya isu-isu strategis tersebut Kemendikdasmen menetapkan arah kebijakan untuk menjawab isu-isu yang telah dipetakan. Arah kebijakan Kemendikdasmen yaitu peningkatan akses pendidikan menengah universal, peningkatan mutu pembelajaran melalui Kurikulum Merdeka, revitalisasi SMK agar link and match dengan dunia kerja, peningkatan kualitas dan distribusi guru serta tenaga kependidikan, transformasi digital

pendidikan, dan penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan tata kelola pendidikan daerah.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, maka Dinas Pendidikan dalam renstranya harus menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan Kemendikdasmen, fokus pada pemerataan akses pendidikan PAUD dan pendidikan dasar (APK PAUD/SD/SMP dan Kesetaraan), mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sesuai kesiapan sekolah, mendukung pengembangan pendidikan dengan kemitraan dengan dunia usaha/industri, memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, meningkatkan kualitas dan pemerataan guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (PKB), dan menyusun sistem data pendidikan daerah yang terintegrasi dengan Dapodik.

Renstra Kemendikdasmen 2025–2029 berfokus pada pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan guru, pemenuhan sarpras, transformasi digital, link and match vokasi, penguatan karakter, dan tata kelola berbasis data sehingga untuk Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang juga akan mengikuti kebijakan dari Kemendikdasmen.

d. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, maka tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah “Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua”.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan menengah dan khusus.
2. Meningkatnya mutu pendidikan menengah dan khusus.
3. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah kejuruan.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pendidikan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pendidikan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang untuk kawasan pendidikan dijabarkan sebagai berikut:

Indikasi Program Kawasan Pendidikan
pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW)
Kota Semarang

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2026	2027	2028	2029	2030		
1	Pengembangan fasilitas pendidikan dasar sampai menengah	Seluruh Kota						APBN, APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pendidikan

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Pendidikan adalah terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Tabel 2.2.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	4.1. Masih kurangnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah
	4.2. Masih kurangnya kualitas pendidikan yang mengikuti kemajuan jaman dan teknologi
	4.3. Masih kurangnya kualitas sarana prasarana pendidikan

Tabel 2.3.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029
Dinas Pendidikan

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	92,05	92,60	93,14	93,69	94,23	94,78	1. Meningkatkan sosialisasi terkait usia sekolah, dimana usia sekolah SD/MI adalah 7-12 tahun 2. Menambah dayatampung SD/MI/sederajat dengan jumlah penduduk SD/MI
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	106,47	108,00	109,52	111,04	112,57	114,09	

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
								serta dengan mensosialisasikan pentingnya pendidikan
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	103,29	104,02	104,75	105,48	106,21	106,94	1. Meningkatkan sosialisasi terkait usia sekolah, dimana usia sekolah SMP/MTs adalah 7-12 tahun 2. Menambah dayatampung SMP/MTs/sederajat dengan jumlah penduduk SMP/MTs serta dengan mensosialisasikan pentingnya pendidikan
4	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Naik	Meningkatkan kemampuan literasi dan matematika dengan pemenuhan guru dan prasarana pendukung
5	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Naik	Pemenuhan sarpras pendukung pembelajaran, terutama di satuan pendidikan negeri dan juga untuk swasta melalui sumber pendanaan APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- Adanya beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu yang menjangkau dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dari sekolah negeri hingga sekolah swasta. - Adanya beasiswa untuk khusus anak petani dan anak nelayan. - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.	Belum optimalnya kualitas pendidikan di Kota Semarang	Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Pertumbuhan Kelas Menengah	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	- Perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan mendukung pencapaian wajib belajar 13 tahun - Perlunya untuk meningkatkan penguasaan dan pengembangan teknologi terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi yang berkembang pesat

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Pendidikan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Semarang kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pendidikan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang pendidikan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pendidikan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan unggul secara merata”

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata.
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan pendidikan.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan unggul secara merata		Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	11,06	11,17	11,34	11,53	11,83	11,93	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun k etas untuk menenpuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani (tanpa apakah pernah tinggal kelas atau tidak). Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang sudah dicapai/ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas. $RLS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke-i)$ Keterangan: RLS = Rata-rata lama sekolah P15+ = Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun Lama sekolah penduduk ke-i: 1) Tidak pernah sekolah = 0 2) Masih sekolah di SD s.d. S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1 3) Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 4) Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir 5) Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1 *Sumber data capaian RLS dari BPS Kota Semarang
			Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	15,62	15,64	15,67	15,69	15,71	15,73	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur *a* di tahun *t* E_i^t : Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t* P_i^t : Jumlah penduduk usia *i* pada tahun *t* i : Usia (a, a + 1, ..., n) FK : Faktor koreksi pesantren *Sumber data capaian HLS dari BPS Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	%	84,12	85,21	87,35	89,65	92,13	93,77	Indeks komposit yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dasar oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pelayanan pendidikan dasar wajib dipenuhi sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat. Indeks SPM Pendidikan = Jumlah indikator SPM yang tercapai / Jumlah indikator SPM yang ditetapkan x 100 *Sumber data capaian dari Rapor Pendidikan Kemendikdasmen
		Meningkatnya kualitas kinerja Pelayanan Pendidikan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan	Angka	80	80,35	81	82,1	83,65	85,35	Nilai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan	Angka	100	100	100	100	100	100	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pendidikan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pendidikan dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Peningkatan kualitas pendidikan dengan pengembangan sekolah swasta gratis, peningkatan kompetensi pendidik serta pendidikan karakter	Peningkatan akses dan mutu pendidikan dengan perluasan bantuan pendidikan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajatam	Peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan fasilitas pendukung pendidikan	Penyelarasan program dan kegiatan nonformal yang bermutu melalui pengembangan kurikulum non formal	Optimalisasi penyelenggaraan PAUD dan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi anak sekolah

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pendidikan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pendidikan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pendidikan.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	1. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, PAUD serta pendidikan nonformal/kesetaraan yang unggul dan merata	Pembagian Satuan Pendidikan baru baik TK, SD, SMP sesuai dengan kajian dan kebutuhan rehab sarpras serta pemenuhan sarpras, dengan tetap melakukan pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM. Dilaksanakan pada Program Pengelolaan Pendidikan
			2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik serta peningkatan jumlah guru bersertifikasi dan minimal lulusan D4/S1 terutama di jenjang PAUD. Dilaksanakan pada Program Pengelolaan Pendidikan
			3. Peningkatan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Mengembangkan pembelajaran PAUD Holistik Integratif (HI) sebagai salah satu upaya untuk pembelajaran karakter sejak usia dini, pencegahan bullying, serta mengembangkan muatan local dalam pembelajaran.

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
				Dilaksanakan pada Program Pengembangan Kurikulum
			4. Pemerataan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang	Pemenuhan pendidik yang memenuhi kualifikasi tertentu, baik minimal lulusan D4/S1 dan bersertifikasi pendidik, di semua Satuan Pendidikan, baik Negeri maupun swasta. Dilaksanakan pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			5. Peningkatan satuan pendidikan dasar dan PAUD serta pendidikan nonformal/kesetaraan yang berizin	Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan, baik yang baru maupun yang sudah beroperasional terkait manajemen di DAPODIK maupun untuk mencapai akreditasi A untuk SD dan SMP. Dilaksanakan pada Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
			6. Peningkatan kualitas perencanan, penganggaran dan keuangan	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaanya. Dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			7. Peningkatan kualitas layanan umum pendidikan	Menyusun standar operasional pelayanan (SOP) sesuai sertifikasi yang dibutuhkan, melakukan peningkatan kompetensi aparatur dan pemenuhan sarana prasarana

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
				pendukungnya. Dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pendidikan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan unggul secara merata	Meningkatnya kualitas kinerja Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris Dinas
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Keuangan dan Aset
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kasubag Keuangan dan Aset
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris Dinas
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pendidikan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pendidikan	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan yang selesai ditindaklanjuti	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan aset SKPD	Persentase Aset Dinas Dalam Kondisi Baik	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Kepala Bidang Pembinaan SD - Kepala Bidang Pembinaan SMP - Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF - Kepala Bidang GTK

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan SD
						1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	- Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD - Subkoor Kurikulum dan Penilaian SD - Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD - Kasi Pembinaan GTK SD
				Tercapainya Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kepala Satuan Pendidikan jenjang SD
				Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
				Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Persentase Literasi di Sekolah Dasar	Literasi Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Subkoor Kurikulum dan Penilaian SD
				Meningkatnya Persentase Numerasi di Sekolah Dasar	Numerasi Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Subkoor Kurikulum dan Penilaian SD
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
				Meningkatnya Persentase Sekolah Dasar Terakreditasi A	Persentase Sekolah Dasar yang Terakreditasi A	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
				Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
				Perpustakaan Sekolah yang Telah Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
				Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	
				Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
				Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan SMP
						1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP - Subkoor Kurikulum dan Penilaian SMP - Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP - Kasi Pembinaan GTK SMP
				Tercapainya Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
				Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kepala Satuan Pendidikan jenjang SMP
				Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
				Meningkatnya Persentase Literasi di Sekolah Menengah Pertama	Literasi Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Subkoor Kurikulum dan Penilaian SMP
				Meningkatnya Persentase Numerasi di Sekolah Menengah Pertama	Numerasi Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Subkoor Kurikulum dan Penilaian SMP
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Meningkatnya Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
				Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
				Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
				Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Ruang kelas sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
				Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
				Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	
				Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
				Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Tingkat partispasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
						1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	- Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF - Subkoor Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF - Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF - Kasi Pembinaan GTK PAUD dan PNF
				Meningkatnya Persentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD	Persentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF
				Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kepala Satuan Pendidikan jenjang PAUD
				Meningkatnya Kapasitasnya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
				Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba	1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Akademik dan Non Akademik	Akademik dan Non Akademik	dan Kreativitas Peserta Didik	
				Meningkatnya Persentase PAUD yang menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	Persentase PAUD yang Menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Subkoor Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
				Meningkatnya Persentase PAUD yang Terakreditasi A	Persentase PAUD yang Terakreditasi A	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF
				Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
				Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	
				Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	1.01.02.2.03.0033 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
				Perpustakaan Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0036 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
				Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
				Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
				Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepalas Sekolah/TU	
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Terbangun	1.01.02.2.03.0050 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
				Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
						1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF - Subkoor Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF - Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF - Kasi Pembinaan GTK PAUD dan PNF
				Meningkatnya Persentase Angka Kelulusan Peserta Didik PNF	Angka Kelulusan Peserta Didik PNF	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Diterima Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kepala Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan
				Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonfromal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
				Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
				Meningkatnya Persentase Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Subkoor Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
				Meningkatnya Persentase Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Subkoor Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kapasitas Bidang Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Meningkatkan Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
				Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan GTK
				Meningkatnya Persentase Guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kasi Pembinaan GTK SD
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Persentase Guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru sekolah menengah pertama yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kasi Pembinaan GTK SMP
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Meningkatnya Persentase Guru PAUD yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kasi Pembinaan GTK PAUD dan PNF
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia Bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
				Meningkatnya persentase guru pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru pendidikan nonformal/kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kasi Pembinaan GTK PAUD dan PNF

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	- Kepala Bidang Pembinaan SD - Kepala Bidang Pembinaan SMP - Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
			Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kepala Bidang Pembinaan SD
						1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	- Subkoor Kurikulum dan Penilaian SD - Subkoor Kurikulum dan Penilaian SMP
				Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan di Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Subkoor Kurikulum dan Penilaian SD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kepala Bidang Pembinaan SMP
				Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Subkoor Kurikulum dan Penilaian SMP
				Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Pendidikan Anak		Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Melaksanakan	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan		Kurikulum Muatan Lokal		
				Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Subkoor Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
				Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
				Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
				Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
						1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan GTK
			Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional		Rasio guru terhadap murid	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan GTK

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualifikasi sesuai Standar	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan GTK
				Meningkatnya Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kasi Pembinaan GTK SD
				Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	- Kepala Bidang Pembinaan SD - Kepala Bidang Pembinaan SMP

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							- Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
			Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan sekolah dasar terhadap ketentuan perizinan yang berlaku		Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan SD
						1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Subkoor Kurikulum dan Penilaian SD - Subkoor Kurikulum dan Penilaian SMP
				Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Subkoor Kurikulum dan Penilaian SD
				Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan sekolah menengah pertama terhadap ketentuan perizinan yang berlaku		Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan SMP
				Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Subkoor Kurikulum dan Penilaian SMP

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal terhadap ketentuan perizinan yang berlaku		Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
				Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Subkoor Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
				Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan	1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu
			- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan, kekerasan dan tindak kriminal, serta menciptakan sekolah ramah anak.
			- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyelesaian ijazah tertahan
			- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - Penyediaan Biaya Personil Sekolah Dasar - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Peningkatan mutu layanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu
			- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan, kekerasan dan tindak kriminal, serta menciptakan sekolah ramah anak.
			- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Peningkatan mutu layanan pendidikan

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyelesaian ijazah tertahan
			- Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik (masing-masing jenjang untuk penghargaan siswa breprestasi dan atlet)	Beasiswa D3/D4/S1 bagi Masyarakat Miskin, Siswa Berprestasi dan Atlet
		Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu
			- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan - Pengelolaan Dana BOP PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Pengadaan Perlengkapan PAUD - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Peningkatan mutu layanan pendidikan

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Penyelesaian ijazah tertahan
		Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu
			- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Pengadaan Perlengkapan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Peningkatan mutu layanan pendidikan
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Menambah bantuan peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter.
2	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Mengintegrasikan literasi kesehatan mental
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
		Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Mengintegrasikan literasi kesehatan mental
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
		Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di lembaga PAUD dan non formal/kesetaraan	- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Mengintegrasikan literasi kesehatan mental
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Memastikan tidak ada tenaga guru honorer yang memperoleh honor di bawah UMK dan memastikan adanya kesejahteraan yang lebih baik.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan terdapat pada lampiran Tabel 4.2.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Pendidikan Kota Semarang

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tujuan: Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan unggul secara merata	Rata-rata lama sekolah	11,05 Tahun	11,17 Tahun		11,34 Tahun		11,53 Tahun		11,83 Tahun		11,93 Tahun		
	Harapan lama sekolah	15,57 Tahun	15,64 Tahun		15,67 Tahun		15,69 Tahun		15,71 Tahun		15,73 Tahun		
Sasaran: 1.Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	83,66%	85,21%		87,35%		89,65%		92,13%		93,77%		
2. Meningkatnya kualitas kinerja Pelayanan Pendidikan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan	78,05	80,35		81,00		82,10		83,65		85,35		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan	91,54	100		100		100		100		100		
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				673.963.962.747		750.349.378.590		783.595.867.063		789.702.774.575		804.107.704.684	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan	1. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	-	100%	622.535.260.194	100%	655.636.982.684	100%	688.241.280.893	100%	721.875.783.503	100%	757.822.000.629	
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				570.000.000		1.820.000.000		1.820.000.000		1.820.000.000		1.820.000.000	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	570.000.000	100%	1.820.000.000	100%	1.820.000.000	100%	1.820.000.000	100%	1.820.000.000	
1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000	7 Dokumen	750.000.000	7 Dokumen	750.000.000	7 Dokumen	750.000.000	7 Dokumen	750.000.000	
1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	
1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	
1.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	
1.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	1.000.000.000	
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				621.765.260.194		653.016.982.684		685.621.280.893		719.855.783.503		755.802.000.629	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	621.765.260.194	100%	653.016.982.684	100%	685.621.280.893	100%	719.855.783.503	100%	755.802.000.629	
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				621.055.260.194		652.106.982.684		684.711.280.893		718.945.783.503		754.892.000.629	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6429 orang/bulan	5667 Orang/Bulan	621.055.260.194	5867 Orang/Bulan	652.106.982.684	6067 Orang/Bulan	684.711.280.893	6267 Orang/Bulan	718.945.783.503	6467 Orang/Bulan	754.892.000.629	
1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				600.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	800.000.000	
1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD												
1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	
1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				200.000.000		800.000.000		800.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	200.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	
1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				200.000.000		800.000.000		800.000.000		200.000.000		200.000.000	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan	2. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan	-	100%	51.428.702.553	100%	94.712.395.906	100%	95.354.586.170	100%	67.826.991.072	100%	46.285.704.055	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				275.000.000		2.025.000.000		2.025.000.000		525.000.000		275.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pendidikan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pendidikan	90%	90,50	275.000.000	90,75	2.025.000.000	91,00	2.025.000.000	91,25	525.000.000	91,50	275.000.000	
1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	
1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				250.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		500.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	200 Orang	250.000.000	600 Orang	2.000.000.000	600 Orang	2.000.000.000	200 Orang	500.000.000	100 Orang	250.000.000	
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.400.000.000		6.600.000.000		6.850.000.000		3.350.000.000		3.350.000.000	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan	100%	100%	2.400.000.000	100%	6.600.000.000	100%	6.850.000.000	100%	3.350.000.000	100%	3.350.000.000	
1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	
1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	
1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	
1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				250.000.000		500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	750.000.000	
1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				250.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	500.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		1.000.000.000		750.000.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	100%	100%	750.000.000	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	100%	1.000.000.000	100%	750.000.000	
1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		750.000.000		750.000.000		500.000.000		250.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	250.000.000	15 Unit	750.000.000	15 Unit	750.000.000	10 Unit	500.000.000	5 Unit	250.000.000	
1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		500.000.000		500.000.000	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	500.000.000	4 Unit	2.000.000.000	4 Unit	2.000.000.000	4 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.183.702.553		75.579.895.906		75.972.086.170		60.131.991.072		40.340.704.055	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	46.183.702.553	100%	75.579.895.906	100%	75.972.086.170	100%	60.131.991.072	100%	40.340.704.055	
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.250.000.000		21.500.000.000		22.750.000.000		20.250.000.000		20.000.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	20.250.000.000	4 Laporan	21.500.000.000	4 Laporan	22.750.000.000	4 Laporan	20.250.000.000	4 Laporan	20.000.000.000	
1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		150.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.883.702.553		53.929.895.906		52.922.086.170		39.581.991.072		20.040.704.055	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	12 Laporan	25.883.702.553	12 Laporan	53.929.895.906	12 Laporan	52.922.086.170	12 Laporan	39.581.991.072	12 Laporan	20.040.704.055	
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.820.000.000		7.757.500.000		7.757.500.000		2.820.000.000		1.570.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan aset SKPD	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan sesuai ketentuan	100%	100%	1.820.000.000	100%	7.757.500.000	100%	7.757.500.000	100%	2.820.000.000	100%	1.570.000.000	
1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				285.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 Unit	285.000.000	6 Unit	285.000.000	6 Unit	285.000.000	6 Unit	285.000.000	6 Unit	285.000.000	
1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				285.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 unit	127 Unit	285.000.000	127 Unit	285.000.000	127 Unit	285.000.000	127 Unit	285.000.000	127 Unit	285.000.000	
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		1.000.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10 Unit	500.000.000	35 Unit	2.500.000.000	35 Unit	2.500.000.000	30 Unit	1.000.000.000	10 Unit	500.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				750.000.000		4.687.500.000		4.687.500.000		1.250.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 Unit	4 Unit	750.000.000	25 Unit	4.687.500.000	25 Unit	4.687.500.000	4 Unit	1.250.000.000	2 Unit	500.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				126.293.365.009		139.654.650.495		145.470.103.864		146.538.320.013		149.058.020.684	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)				53.338.365.009		62.049.650.495		61.645.103.864		60.968.320.013		61.948.020.684	
Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	1.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,50%	100%	51.988.365.009	100%	60.699.650.495	100%	60.295.103.864	100%	59.618.320.013	100%	60.598.020.684	
Tercapainya Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar	a. Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar	99,83%	100%	28.088.365.009	100%	33.599.650.495	100%	35.915.103.864	100%	37.478.320.013	100%	38.198.020.684	
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.500.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	5.500 Peserta Didik	1.500.000.000	6.000 Peserta Didik	1.750.000.000	6.000 Peserta Didik	1.750.000.000	6.500 Peserta Didik	2.000.000.000	6.500 Peserta Didik	2.000.000.000	
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				21.438.365.009		26.449.650.495		28.515.103.864		29.578.320.013		30.298.020.684	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	508 Satuan Pendidikan	513 Satuan Pendidikan	21.438.365.009	513 Satuan Pendidikan	26.449.650.495	513 Satuan Pendidikan	28.515.103.864	513 Satuan Pendidikan	29.578.320.013	513 Satuan Pendidikan	30.298.020.684	
1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	499 Satuan Pendidikan	513 Orang	650.000.000	513 Orang	650.000.000	513 Orang	650.000.000	513 Orang	650.000.000	513 Orang	650.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				4.500.000.000		4.750.000.000		5.000.000.000		5.250.000.000		5.250.000.000	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11171 Peserta Didik	17.190 Peserta Didik	4.500.000.000	17.700 Peserta Didik	4.750.000.000	18.220 Peserta Didik	5.000.000.000	18.680 Peserta Didik	5.250.000.000	19.220 Peserta Didik	5.250.000.000	
Meningkatnya Persentase Literasi di Sekolah Dasar	b. Literasi Sekolah Dasar	77,90%	87,5%	1.300.000.000	89,2%	1.300.000.000	91,6%	1.300.000.000	94,2%	1.300.000.000	97,6%	1.300.000.000	
Meningkatnya Persentase Numerasi di Sekolah Dasar	c. Numerasi Sekolah Dasar	66,28%	84,1%	1.000.000.000	86,2%	1.000.000.000	88,3%	1.000.000.000	91,6%	1.000.000.000	94,2%	1.000.000.000	
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	4 Dokumen	450.000.000	4 Dokumen	450.000.000	5 Dokumen	450.000.000	5 Dokumen	450.000.000	5 Dokumen	450.000.000	
1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	550 Orang	750.000.000	600 Orang	750.000.000	650 Orang	750.000.000	700 Orang	750.000.000	750 Orang	750.000.000	
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	502 Satuan Pendidikan	513 Satuan Pendidikan	1.000.000.000	513 Satuan Pendidikan	1.000.000.000	513 Satuan Pendidikan	1.000.000.000	513 Satuan Pendidikan	1.000.000.000	513 Satuan Pendidikan	1.000.000.000	
Meningkatnya Persentase Sekolah Dasar Terakreditasi A	d. Persentase Sekolah Dasar yang Terakreditasi A	64,69%	67,06%	21.600.000.000	69,03%	24.800.000.000	72,19%	22.080.000.000	74,95%	19.840.000.000	78,30%	20.100.000.000	
1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				-		150.000.000		150.000.000		300.000.000		300.000.000	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	-	1 Ruang	150.000.000	1 Ruang	150.000.000	2 Ruang	300.000.000	2 Ruang	300.000.000	
1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				750.000.000		750.000.000		600.000.000		300.000.000		600.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	5 Ruang	750.000.000	5 Ruang	750.000.000	4 Ruang	600.000.000	2 Ruang	300.000.000	4 Ruang	600.000.000	
1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah				750.000.000		750.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	5 Ruang	750.000.000	5 Ruang	750.000.000	1 Ruang	150.000.000	1 Ruang	150.000.000	1 Ruang	150.000.000	
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.200.000.000		1.200.000.000		1.280.000.000		1.440.000.000		1.600.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	1.200.000.000	15 Unit	1.200.000.000	16 Unit	1.280.000.000	18 Unit	1.440.000.000	20 Unit	1.600.000.000	
1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				-		-		200.000.000		200.000.000		-	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	-	0 Ruang	-	2 Ruang	200.000.000	2 Ruang	200.000.000	0 Ruang	-	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				600.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	6 Ruang	600.000.000	2 Ruang	200.000.000	2 Ruang	200.000.000	2 Ruang	200.000.000	2 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				500.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Perpustakaan Sekolah yang Telah Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	5 Ruang	500.000.000	2 Ruang	200.000.000	2 Ruang	200.000.000	2 Ruang	200.000.000	2 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah				1.500.000.000		1.750.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	2 Paket	1.500.000.000	3 Paket	1.750.000.000	2 Paket	1.500.000.000	2 Paket	1.500.000.000	2 Paket	1.500.000.000	
1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah				1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	61 Paket	6 Paket	1.200.000.000	6 Paket	1.200.000.000	6 Paket	1.200.000.000	6 Paket	1.200.000.000	6 Paket	1.200.000.000	
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	502 Satuan Pendidikan	513 Satuan Pendidikan	750.000.000	513 Satuan Pendidikan	750.000.000	513 Satuan Pendidikan	750.000.000	513 Satuan Pendidikan	750.000.000	513 Satuan Pendidikan	750.000.000	
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5555 Paket	4500 Paket	800.000.000	4500 Paket	800.000.000	4500 Paket	800.000.000	4500 Paket	800.000.000	4500 Paket	800.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.500.000.000		5.000.000.000		3.750.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	6 Ruang	1.500.000.000	20 Ruang	5.000.000.000	15 Ruang	3.750.000.000	6 Ruang	1.500.000.000	6 Ruang	1.500.000.000	
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit	15 Unit	3.750.000.000	15 Unit	3.750.000.000	15 Unit	3.750.000.000	15 Unit	3.750.000.000	15 Unit	3.750.000.000	
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				3.500.000.000		3.500.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Ruang	30 Ruang	3.500.000.000	30 Ruang	3.500.000.000	24 Ruang	2.750.000.000	24 Ruang	2.750.000.000	24 Ruang	2.750.000.000	
1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	800.000.000	16 Paket	800.000.000	16 Paket	800.000.000	16 Paket	800.000.000	16 Paket	800.000.000	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				43.175.000.000		45.775.000.000		46.775.000.000		50.035.000.000		52.250.000.000	
Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,50%	100%	41.925.000.000	100%	44.525.000.000	100%	45.525.000.000	100%	48.785.000.000	100%	51.000.000.000	
Tercapainya Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	a. Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	19.975.000.000	100%	22.550.000.000	100%	26.300.000.000	100%	29.560.000.000	100%	31.725.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				2.000.000.000		2.250.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		3.000.000.000	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5333 Peserta Didik	11138 Peserta Didik	2.000.000.000	12100 Peserta Didik	2.250.000.000	12460 Peserta Didik	2.500.000.000	13100 Peserta Didik	2.750.000.000	13800 Peserta Didik	3.000.000.000	
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2240 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	1.000.000.000	2500 Peserta Didik	1.000.000.000	2500 Peserta Didik	1.000.000.000	2500 Peserta Didik	1.000.000.000	2500 Peserta Didik	1.000.000.000	
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				16.525.000.000		18.850.000.000		22.350.000.000		25.360.000.000		27.275.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	194 Satuan Pendidikan	199 Satuan Pendidikan	16.525.000.000	199 Satuan Pendidikan	18.850.000.000	199 Satuan Pendidikan	22.350.000.000	199 Satuan Pendidikan	25.360.000.000	199 Satuan Pendidikan	27.275.000.000	
1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	199 Orang	450.000.000	199 Orang	450.000.000	199 Orang	450.000.000	199 Orang	450.000.000	199 Orang	450.000.000	
Meningkatnya Persentase Literasi di Sekolah Menengah Pertama	b. Literasi Sekolah Menengah Pertama	81,63%	91,8 %	1.025.000.000	93,2 %	1.025.000.000	95,4 %	1.025.000.000	96,7 %	1.025.000.000	98,5 %	1.025.000.000	
Meningkatnya Persentase Numerasi di Sekolah Menengah Pertama	c. Numerasi Sekolah Menengah Pertama	74,67%	89,1 %	750.000.000	92,3 %	750.000.000	94,2 %	750.000.000	96,5 %	750.000.000	98,9 %	750.000.000	
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	350.000.000	8 Dokumen	350.000.000	8 Dokumen	350.000.000	8 Dokumen	350.000.000	
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	195 Satuan Pendidikan	199 Satuan Pendidikan	750.000.000	199 Satuan Pendidikan	750.000.000	199 Satuan Pendidikan	750.000.000	199 Satuan Pendidikan	750.000.000	199 Satuan Pendidikan	750.000.000	
1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				575.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	225 Orang	575.000.000	250 Orang	575.000.000	300 Orang	575.000.000	325 Orang	575.000.000	350 Orang	575.000.000	
Meningkatnya Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	d. Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	62,69%	69,95 %	20.175.000.000	73,58 %	20.200.000.000	76,68 %	17.450.000.000	79,79 %	17.450.000.000	83,42 %	17.500.000.000	
1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				5.000.000.000		5.000.000.000		-		-		-	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				200.000.000		200.000.000		-		-		-	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	0 Ruang	-	0 Ruang	-	0 Ruang	-	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	4 Ruang	800.000.000	4 Ruang	800.000.000	4 Ruang	800.000.000	4 Ruang	800.000.000	4 Ruang	800.000.000	
1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah				400.000.000		400.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	2 Ruang	400.000.000	2 Ruang	400.000.000	3 Ruang	600.000.000	3 Ruang	600.000.000	3 Ruang	600.000.000	
1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium				400.000.000		400.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	2 Ruang	400.000.000	2 Ruang	400.000.000	3 Ruang	600.000.000	3 Ruang	600.000.000	3 Ruang	600.000.000	
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	3 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000	4 Unit	400.000.000	4 Unit	400.000.000	4 Unit	400.000.000	
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				1.000.000.000		1.000.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000	
Ruang kelas sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	97 Ruang	60 Ruang	1.000.000.000	60 Ruang	1.000.000.000	70 Ruang	1.150.000.000	70 Ruang	1.150.000.000	70 Ruang	1.150.000.000	
1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.150.000.000		1.150.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	2 Ruang	300.000.000	2 Ruang	300.000.000	3 Ruang	450.000.000	3 Ruang	450.000.000	3 Ruang	450.000.000	
1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				300.000.000		300.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	2 Ruang	300.000.000	2 Ruang	300.000.000	3 Ruang	450.000.000	3 Ruang	450.000.000	3 Ruang	450.000.000	
1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	4 Ruang	600.000.000	4 Ruang	600.000.000	4 Ruang	600.000.000	4 Ruang	600.000.000	4 Ruang	600.000.000	
1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah				900.000.000		900.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	6 Ruang	900.000.000	6 Ruang	900.000.000	8 Ruang	1.200.000.000	8 Ruang	1.200.000.000	8 Ruang	1.200.000.000	
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				900.000.000		900.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	6 Unit	900.000.000	6 Unit	900.000.000	8 Unit	1.200.000.000	8 Unit	1.200.000.000	8 Unit	1.200.000.000	
1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	5 Paket	1.500.000.000	5 Paket	1.500.000.000	10 Paket	3.000.000.000	10 Paket	3.000.000.000	10 Paket	3.000.000.000	
1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah				1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	8 Paket	7 Paket	1.400.000.000	7 Paket	1.400.000.000	7 Paket	1.400.000.000	7 Paket	1.400.000.000	7 Paket	1.400.000.000	
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				450.000.000		475.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	190 Satuan pendidikan	230 Satuan Pendidikan	450.000.000	235 Satuan Pendidikan	475.000.000	240 Satuan Pendidikan	500.000.000	240 Satuan Pendidikan	500.000.000	245 Satuan Pendidikan	550.000.000	
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru				4.375.000.000		4.375.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	37 Ruang	25 Ruang	4.375.000.000	25 Ruang	4.375.000.000	20 Ruang	3.500.000.000	20 Ruang	3.500.000.000	20 Ruang	3.500.000.000	
1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				650.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 paket	46 Paket	650.000.000	46 Paket	650.000.000	48 Paket	700.000.000	48 Paket	700.000.000	48 Paket	700.000.000	
1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				400.000.000		400.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	2 Ruang	400.000.000	2 Ruang	400.000.000	3 Ruang	600.000.000	3 Ruang	600.000.000	3 Ruang	600.000.000	
1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 paket	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				23.850.000.000		26.125.000.000		30.675.000.000		29.025.000.000		28.175.000.000	
Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3. Tingkat partispasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97,75%	100 %	22.850.000.000	100 %	25.125.000.000	100 %	29.675.000.000	100 %	28.025.000.000	100 %	27.175.000.000	
Meningkatnya Persentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD	a. Persentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD	-	80 %	14.875.000.000	90 %	15.900.000.000	92 %	17.250.000.000	94 %	18.400.000.000	100 %	19.700.000.000	
1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				1.475.000.000		1.500.000.000		1.850.000.000		2.000.000.000		2.300.000.000	
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2125 Peserta Didik	2259 Peserta Didik	1.475.000.000	2300 Peserta Didik	1.500.000.000	2350 Peserta Didik	1.850.000.000	2400 Peserta Didik	2.000.000.000	2450 Peserta Didik	2.300.000.000	
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD				12.000.000.000		13.000.000.000		14.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1102 Satuan Pendidikan	1124 Satuan	12.000.000.000	1144 Satuan	13.000.000.000	1164 Satuan	14.000.000.000	1184 Satuan	15.000.000.000	1204 Satuan	16.000.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Pendidikan		Pendidikan		Pendidikan		Pendidikan		Pendidikan		
1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
Meningkatnya Kapasitasnya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0 Orang	1100 Orang	650.000.000	1100 Orang	650.000.000	1100 Orang	650.000.000	1100 Orang	650.000.000	1100 Orang	650.000.000	
1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	750 Peserta Didik	750.000.000	750 Peserta Didik	750.000.000	750 Peserta Didik	750.000.000	750 Peserta Didik	750.000.000	750 Peserta Didik	750.000.000	
Meningkatnya Persentase PAUD yang menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	b. Persentase PAUD yang Menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	-	85%	1.275.000.000	88%	1.275.000.000	90%	1.275.000.000	95%	1.275.000.000	100%	1.275.000.000	
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	6 Dokumen	250.000.000	6 Dokumen	250.000.000	6 Dokumen	250.000.000	
1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	250 Orang	200.000.000	250 Orang	200.000.000	250 Orang	200.000.000	250 Orang	200.000.000	250 Orang	200.000.000	
1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1457 Satuan Pendidikan	1457 Satuan Pendidikan	750.000.000	1581 Satuan Pendidikan	750.000.000	1689 Satuan Pendidikan	750.000.000	1735 Satuan Pendidikan	750.000.000	1824 Satuan Pendidikan	750.000.000	
Meningkatnya Persentase PAUD yang Terakreditasi A	c. Persentase PAUD yang Terakreditasi A	5,70%	10,42 %	6.700.000.000	11,47 %	7.950.000.000	12,86 %	11.150.000.000	14,73 %	8.350.000.000	16,33 %	6.200.000.000	
1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	
1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	500.000.000	4 Paket	500.000.000	4 Paket	500.000.000	4 Paket	500.000.000	4 Paket	500.000.000	
1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		450.000.000	
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	4 Paket	600.000.000	4 Paket	600.000.000	4 Paket	600.000.000	4 Paket	600.000.000	3 Paket	450.000.000	
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	250 Satuan Pendidikan	260 Satuan Pendidikan	500.000.000	260 Satuan Pendidikan	500.000.000	260 Satuan Pendidikan	500.000.000	260 Satuan Pendidikan	500.000.000	260 Satuan Pendidikan	500.000.000	
1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	1 Ruang	300.000.000	1 Ruang	300.000.000	1 Ruang	300.000.000	1 Ruang	300.000.000	1 Ruang	300.000.000	
1.01.02.2.03.0033 Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	0 Ruang	0 Ruang	0	0 Ruang	0	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.03.0036 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0		0		0		200.000.000		200.000.000	
Perpustakaan Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				200.000.000		3.000.000.000		6.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	2 Unit	2.000.000.000	3 Unit	3.000.000.000	5 Unit	6.000.000.000	3 Unit	3.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	
1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	
1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	
1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket	2 Paket	500.000.000	4 Paket	750.000.000	4 Paket	750.000.000	4 Paket	750.000.000	4 Paket	750.000.000	
1.01.02.2.03.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepalas Sekolah/TU				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.03.0050 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Terbangun	0 Ruang	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.930.000.000		5.705.000.000		6.375.000.000		6.510.000.000		6.685.000.000	
Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	4. Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	83,58%	100 %	5.430.000.000	100 %	5.200.000.000	100 %	5.850.000.000	100 %	5.975.000.000	100 %	6.135.000.000	
Meningkatnya Persentase Angka Kelulusan Peserta Didik PNF	a. Angka Kelulusan Peserta Didik PNF	-	99 %	2.280.000.000	99,2 %	2.350.000.000	99,27 %	2.450.000.000	99,54 %	2.575.000.000	99,85 %	2.735.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Diterima Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4325 Peserta Didik	300 Peserta Didik	750.000.000	350 Peserta Didik	750.000.000	375 Peserta Didik	750.000.000	400 Peserta Didik	750.000.000	450 Peserta Didik	750.000.000	
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				785.000.000		825.000.000		875.000.000		935.000.000		985.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	32 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	785.000.000	38 Satuan Pendidikan	825.000.000	39 Satuan Pendidikan	875.000.000	40 Satuan Pendidikan	935.000.000	41 Satuan Pendidikan	985.000.000	
1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				985.000.000		250.000.000		250.000.000		290.000.000		325.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonfromal/Kesetaraan	0 Orang	74 Orang	245.000.000	76 Orang	250.000.000	78 Orang	275.000.000	80 Orang	290.000.000	82 Orang	325.000.000	
1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				500.000.000		525.000.000		550.000.000		600.000.000		675.000.000	
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	200 Peserta Didik	500.000.000	225 Peserta Didik	525.000.000	250 Peserta Didik	550.000.000	275 Peserta Didik	600.000.000	300 Peserta Didik	675.000.000	
Meningkatnya Persentase Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	b. Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79,13%	81,3 %	275.000.000	82,6 %	275.000.000	83,9 %	325.000.000	85,3 %	325.000.000	88,5 %	325.000.000	
Meningkatnya Persentase Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	c. Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	68,95%	80,4 %	675.000.000	82,1 %	675.000.000	84,2 %	675.000.000	86,1 %	675.000.000	87,5 %	675.000.000	
1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	
1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				75.000.000		75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	
1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	50 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	70 Orang	100.000.000	80 Orang	100.000.000	90 Orang	100.000.000	
1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	3600 Peserta Didik	675.000.000	3800 Peserta Didik	675.000.000	4000 Peserta Didik	675.000.000	4200 Peserta Didik	675.000.000	4400 Peserta Didik	675.000.000	
Meningkatkan Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	d. Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	40,00%	51,43 %	2.200.000.000	68,57 %	1.900.000.000	82,86 %	2.400.000.000	91,43 %	2.400.000.000	100 %	2.400.000.000	
1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	75.000.000	40 Satuan Pendidikan	75.000.000	40 Satuan Pendidikan	75.000.000	40 Satuan Pendidikan	75.000.000	40 Satuan Pendidikan	75.000.000	
1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	
1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru				100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0 Ruang	0	0 Ruang	0	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	
1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah				375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	375.000.000	1 Paket	375.000.000	1 Paket	375.000.000	1 Paket	375.000.000	1 Paket	375.000.000	
1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		0		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	1 Unit	300.000.000	0 Unit	0	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	
1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	
1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	
1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	1 Ruang	250.000.000	1 Ruang	250.000.000	1 Ruang	250.000.000	1 Ruang	250.000.000	1 Ruang	250.000.000	
1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	400.000.000	1 Ruang	400.000.000	1 Ruang	400.000.000	1 Ruang	400.000.000	1 Ruang	400.000.000	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	5. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,02%	86,97 %	4.100.000.000	89,37 %	4.105.000.000	90,07 %	4.125.000.000	91,17 %	4.135.000.000	91,43 %	4.150.000.000	
Meningkatnya Persentase Guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi SI/D-IV	a. Persentase guru sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	96,83%	97,60%	1.350.000.000	100 %	1.350.000.000	100 %	1.350.000.000	100 %	1.350.000.000	100 %	1.350.000.000	
1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0 Orang	7750 Orang	500.000.000	7750 Orang	500.000.000	7760 Orang	500.000.000	7760 Orang	500.000.000	7785 Orang	500.000.000	
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600 Orang	1600 Orang	850.000.000	1600 Orang	850.000.000	1600 Orang	850.000.000	1600 Orang	850.000.000	1600 Orang	850.000.000	
Meningkatnya Persentase Guru Sekolah Menengah	b. Persentase guru sekolah menengah pertama yang	96,21%	97,15%	1.250.000.000	100 %	1.250.000.000	100 %	1.250.000.000	100 %	1.250.000.000	100 %	1.250.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pertama yang berkualifikasi SI/D-IV	memenuhi kualifikasi S1/D-IV												
1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	4792 Orang	450.000.000	4835 Orang	450.000.000	4835 Orang	450.000.000	4867 Orang	450.000.000	4913 Orang	450.000.000	
1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	925 Orang	800.000.000	925 Orang	800.000.000	950 Orang	800.000.000	950 Orang	800.000.000	950 Orang	800.000.000	
Meningkatnya Persentase Guru PAUD yang berkualifikasi SI/D-IV	c. Persentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	62,02%	66,15 %	1.000.000.000	68,1 %	1.000.000.000	70,2 %	1.000.000.000	73,5 %	1.000.000.000	74,3 %	1.000.000.000	
1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia Bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 Orang	2292 Orang	350.000.000	2295 Orang	350.000.000	2305 Orang	350.000.000	2305 Orang	350.000.000	2305 Orang	350.000.000	
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	5 Orang	250 Orang	650.000.000	275 Orang	650.000.000	300 Orang	650.000.000	375 Orang	650.000.000	400 Orang	650.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi												
Meningkatnya persentase guru pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	d. Persentase guru pendidikan nonformal/kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100%	100 %	500.000.000	100 %	505.000.000	100 %	525.000.000	100 %	535.000.000	100 %	550.000.000	
1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Orang	2 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	6 Orang	50.000.000	8 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	
1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				450.000.000		455.000.000		475.000.000		485.000.000		500.000.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	55 Orang	450.000.000	60 Orang	455.000.000	65 Orang	475.000.000	70 Orang	485.000.000	75 Orang	500.000.000	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				687.945.401		760.727.014		792.404.960		798.223.749		811.949.066	
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				425.495.000		470.527.014		490.204.000		495.204.000		505.549.066	
Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100 %	325.495.000	100 %	350.527.014	100 %	370.204.000	100 %	375.204.000	100 %	385.549.066	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan di Sekolah Dasar	a. Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	-	85 %	325.495.000	88 %	350.527.014	91 %	370.204.000	94 %	375.204.000	100 %	385.549.066	
1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				500.000.000		180.527.014		190.204.000		195.204.000		205.549.066	
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	55000 Buku	6585 Buku	175.495.000	6585 Buku	180.527.014	6585 Buku	190.204.000	6585 Buku	195.204.000	6585 Buku	205.549.066	
1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				150.000.000		150.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	45 Orang	100 Orang	150.000.000	100 Orang	170.000.000	100 Orang	180.000.000	100 Orang	180.000.000	100 Orang	180.000.000	
Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100 %	100.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	
Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama	b. Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	-	90 %	100.000.000	93 %	120.000.000	95 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	
1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	
1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran				50.000.000		60.000.000		60.000.000	60.000.000			60.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				262.450.401		290.200.000		302.200.960		303.019.749		306.400.000	
Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di lembaga PAUD dan non formal/kesetaraan	3. Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	-	100 %	262.450.401	100 %	290.200.000	100 %	302.200.960	100 %	303.019.749	100 %	306.400.000	
Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	a. Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	-	85 %	262.450.401	87,7 %	290.200.000	89,6 %	302.200.960	92 %	303.019.749	94,2 %	306.400.000	
1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	
1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				162.450.401		162.450.401		182.200.960		183.019.749		186.400.000	
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	0 Buku	4500 Buku	162.450.401	4500 Buku	170.200.000	4500 Buku	182.200.960	4500 Buku	183.019.749	4500 Buku	186.400.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	60.000.000	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				71.233.087.227		78.769.236.212		82.049.319.034		82.651.823.640		84.073.007.229	
Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	1. Rasio guru terhadap murid	01:18	01:18	46.003.087.227	01:18	46.003.087.227	01:18	46.003.087.227	01:18	46.003.087.227	01:18	46.003.087.227	
	2. Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualifikasi sesuai Standar	61.71 %	72,13 %	25.230.000.000	79,57 %	26.250.000.000,00	87,4 %	27.500.000.000,00	88,45 %	27.500.000.000,00	89,56 %	27.500.000.000	
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				71.233.087.227		78.769.236.212		82.049.319.034		82.651.823.640		84.073.007.229	
Meningkatnya Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	a. Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	100 %	71.233.087.227	100 %	78.769.236.212	100 %	82.049.319.034	100 %	82.651.823.640	100 %	84.073.007.229	
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				46.003.087.227		52.519.236.212		54.549.319.034		55.151.823.640		56.573.007.229	
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	18 Dokumen	18 Dokumen	46.003.087.227	18 Dokumen	52.519.236.212	18 Dokumen	54.549.319.034	18 Dokumen	55.151.823.640	18 Dokumen	56.573.007.229	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan												
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				25.230.000.000		26.250.000.000		27.500.000.000		27.500.000.000		27.500.000.000	
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	7 Laporan	7 Laporan	25.230.000.000	7 Laporan	26.250.000.000	7 Laporan	27.500.000.000	7 Laporan	27.500.000.000	7 Laporan	27.500.000.000	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				401.719.942		444.220.154		462.718.225		466.116.058		474.130.842	
1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	1. Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	100%	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	
Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	a. Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	
1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan sekolah menengah pertama terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	2. Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin	100%	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	
Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	b. Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	
1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				281.719.942		324.220.154		342.718.225		346.116.058		354.130.842	
Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	3. Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin	95%	100 %	281.719.942	100 %	324.220.154	100 %	342.718.225	100 %	346.116.058	100 %	354.130.842	
Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	a. Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100 %	281.719.942	100 %	324.220.154	100 %	342.718.225	100 %	346.116.058	100 %	354.130.842	
1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				106.719.942		114.220.154		127.718.225		131.116.058		139.130.842	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	15 Dokumen	106.719.942	15 Dokumen	114.220.154	15 Dokumen	127.718.225	15 Dokumen	131.116.058	15 Dokumen	139.130.842	
1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				125.000.000		150.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	15 Dokumen	125.000.000	15 Dokumen	150.000.000	15 Dokumen	155.000.000	15 Dokumen	155.000.000	15 Dokumen	155.000.000	
1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	

Rencana Pendapatan Dinas Pendidikan
Kota Semarang

No.	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	855.715.701	867.074.633	927.769.857	992.713.747	1.062.203.709	1.136.557.969	Retribusi Kantin Sekolah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota Pendidikan

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan: Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan unggul secara merata									
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,06	11,17	11,34	11,53	11,83	11,93	
2	Harapan lama sekolah	Tahun	15,62	15,64	15,67	15,69	15,71	15,73	
Sasaran: 1.Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata									
3	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	%	84,12	85,21	87,35	89,65	92,13	93,77	

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan
Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)								
	a.Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	
	b.Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	80,13	80,13	81,9	83,1	85,3	86,72	
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	70,5	71,48	72,46	73,43	74,41	75,39	
6	Angka Partisipasi Kasar								
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	97,93	98,62	98,97	99,35	99,7	100	
	b. SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	c. SLTP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	
7	Angka Partisipasi Murni :								
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	91,44	92,01	92,73	93,11	93,44	93,75	
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	86,44	86,76	87,1	87,38	87,7	88,01	
8	Angka Putus Sekolah:								
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
9	Angka Kelulusan:								
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	
10	Angka Melanjutkan (AM):								
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	
11	Fasilitas Pendidikan:								
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	97	97,33	97,66	97,99	98,32	98,65	
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,4	99,41	99,43	99,44	99,45	99,46	
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata-rata								
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	1:18:28	1:18:28	1:18:28	1:18:28	1:18:28	1:18:28	
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	Rasio	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	Rasio	1:15:32	1:15:32	1:15:32	1:15:32	1:15:32	1:15:32	
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV								
	a. Jenjang PAUD	%	64,2	65,3	67	69,5	72	75	
	b. Jenjang SD/MI	%	97	97,3	97,7	98	98,2	98,5	
	c. Jenjang SMP/MTs	%	96,45	96,75	97,6	97,9	98,4	98,7	
13	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	
14	Rerata Skor Literasi Membaca SD/Sederajat	%	79	80,2	81,6	83	84,50	86,2	
15	Rerata Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	81,97	83.07	84,17	85,27	86,37	87,47	
16	Rerata Skor Numerasi SD/Sederajat	%	67,5	68,4	70,06	71,8	73,8	74,63	
17	Rerata Skor Numerasi SMP/Sederajat	%	76,1	77,6	78,1	81,5	82,70	84,1	
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21,22	21,69	22,16	22,63	23,1	23,57	
19	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	97,92	98,21	98,81	99,4	100	100	
20	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok	%	24,55	25,2	27,1	28,3	29,55	29,93	

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	bahasa daerah dan mengarusutamakan kebudayaan								

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pendidikan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Pendidikan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Permasalahan pendidikan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pendidikan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan pendidikan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

2. DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang maka Dinas Kesehatan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang kesehatan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 93 Tahun 2021).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang kesehatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan layanan kesehatan primer, pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan literasi kesehatan sesuai arah kebijakan RPJMN. Penguatan layanan kesehatan primer menjadi fokus utama dalam RPJMN 2025-2029 meliputi pemeriksaan kesehatan gratis dan berbagai upaya preventif serta promotif, selain itu ditekankan pula pembaharuan fokus sektor kesehatan untuk merealisasikan Visi Indonesia Emas 2045 dengan penekanan pada peningkatan akses, kualitas layanan serta literasi kesehatan masyarakat. Disamping itu pemerataan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit dan kemandirian perbekalan kesehatan juga ditonjolkan sebagai prioritas strategis.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang No. 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dan UPTD;
d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kinerja pegawai;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dan UPTD;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dan UPTD;
k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a) Kepala Dinas;
b) Sekretariat, terdiri atas:
   1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c) Bidang Kesehatan Masyarakat;
d) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e) Bidang Pelayanan Kesehatan;
f) Bidang Sumberdaya Kesehatan;
g) Rumah Sakit Daerah;
h) UPTD;
i) Puskesmas dan;
j) Jabatan Fungsional

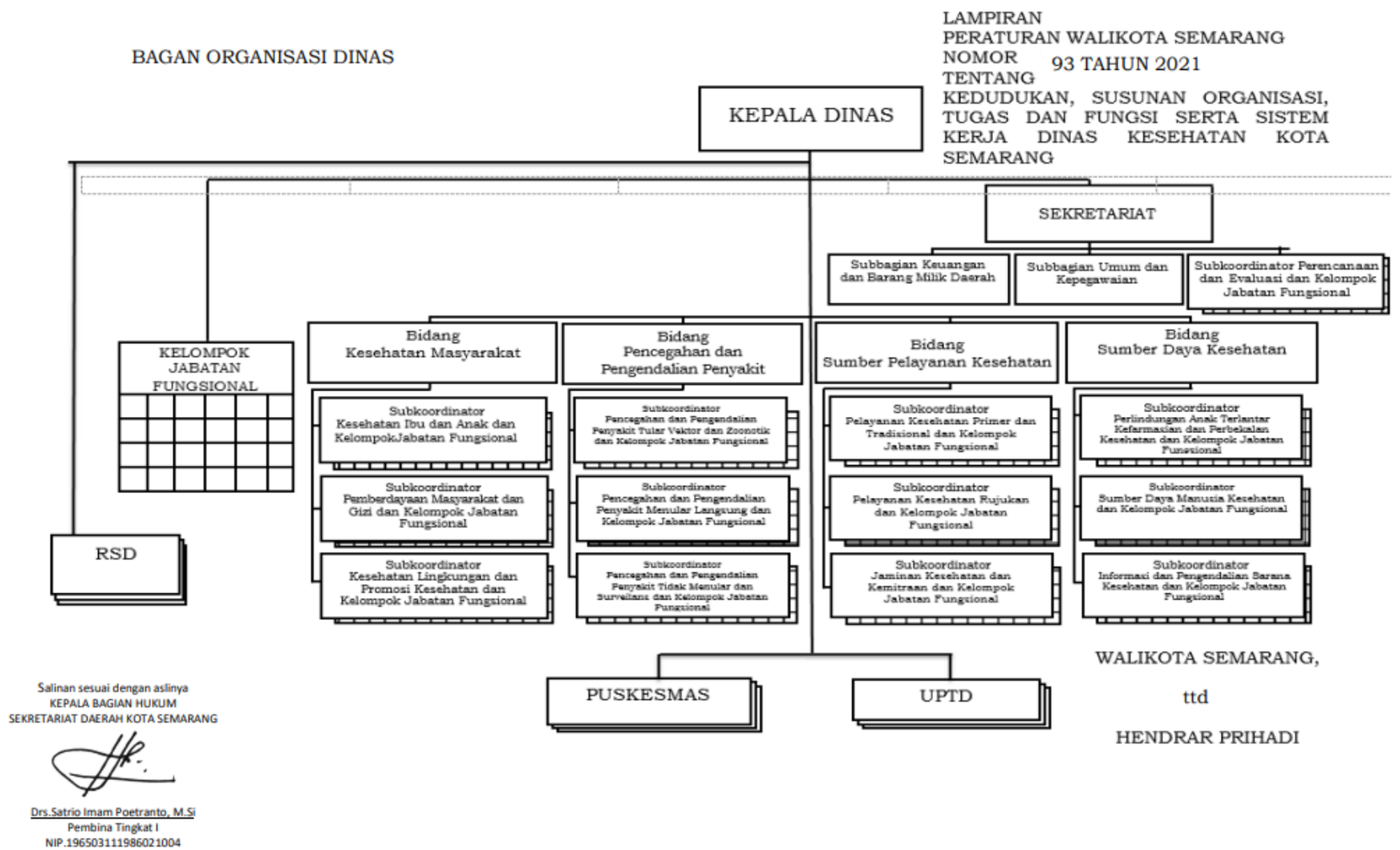

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang

a. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang No. 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
2) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD. Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan dan Aset;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
   f. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
   g. menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
   h. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
   i. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
   j. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Dinas;
   k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   l. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
   m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
e. menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
g. menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
h. menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
i. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
j. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
q. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c). Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
e. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
f. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

g. menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan
i. bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
l. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
m. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi dan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
a. Subkoordinator Kesehatan Ibu dan Anak;
b. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi; dan
c. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan,

a) Subkoordinator Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal;
i. menyiapkan kegiatan pembinaan dan supervisi fasilitatif ke fasilitas kesehatan Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri dan Rumah Sakit;
j. menyiapkan kegiatan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah dan Kesehatan Reproduksi Remaja;
k. menyiapkan kegiatan pelayanan kesehatan akibat kekerasan terhadap anak dan perempuan;
l. menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
o. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;

q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gizi;
h. menyiapkan kegiatan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
i. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
j. menyiapkan kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Institusi Pendidikan dan Lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan program peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan institusi kesehatan;
l. menyiapkan kegiatan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dan sekolah dan institusi kesehatan;
m. menyiapkan kegiatan upaya pengembangan potensi dan peran serta masyarakat sekolah dibidang kesehatan;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan Peta Informasi Gizi;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian program perbaikan gizi masyarakat, dan lansia;
p. menyiapkan kegiatan penanggulangan gizi buruk secara komprehensif;
q. menyiapkan kegiatan pemantauan status gizi, tumbuh kembang bayi dan balita, serta pemberian ASI Eksklusif;
r. menyiapkan kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin
s. menyiapkan kegiatan penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia Gizi Besi, Kurang Vitamin A, Gangguan Akibat Kurang Iodium, serta risiko akibat gizi lebih dan penyakit degeneratif;
t. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemantauan konsumsi garam beryodium;
u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi;
v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi;
w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
x. menyiapkan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi;
y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi; dan
z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
   b. membagi tugas kepada bawahan;
   c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
   d. memeriksa hasil kerja bawahan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
   f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
   h. menyiapkan kegiatan penyusunan peta kesehatan lingkungan;
   i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawasan kualitas air, kualitas air kolam renang dan pemandian umum serta kualitas lingkungan (tanah, udara, kebisingan), tempat pengolahan makanan dan minuman termasuk jasa boga dan industri makanan dan minuman, penyehatan tempat-tempat umum, dan penyehatan tempat pengolahan pestisida;
   j. menyiapkan kegiatan uji laboratorium kualitas makanan dan minuman di tempat pengelolaan makanan termasuk jasa boga dan industri makanan dan minuman);
   k. menyiapkan kegiatan penilaian tingkat mutu hygiene sanitasi rumah makan, restoran dan hotel;
   l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap sarana sanitasi industri, pembuangan sampah, dan pengendalian populasi lalat;
   m. menyiapkan kegiatan monitoring kebisingan dan kualitas udara, di tempat-tempat pengelolaan makanan termasuk jasa boga dan industri makanan dan minuman, di tempat-tempat umum, dan tempat pengelolaan pestisida;
   n. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
   o. menyiapkan kegiatan pelaporan program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
   p. menyiapkan kegiatan promosi kesehatan dengan memanfaatkan berbagai media penyuluhan;
   q. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan sarana dan metoda untuk peningkatan kesehatan masyarakat;
   r. menyiapkan kegiatan pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektoral;
   s. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
   t. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
   u. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   v. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
   w. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan; dan
   x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
   a. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
   b. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; dan
   c. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans.

   a) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik mempunyai tugas :
      a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
      b. membagi tugas kepada bawahan;
      c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
      d. memeriksa hasil kerja bawahan;
      e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
      f. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
      g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
      h. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
      i. menyiapkan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
      j. menyiapkan kegiatan pemberantasan penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
      k. menyiapkan kegiatan penyelidikan epidemiologi penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
      l. menyiapkan kegiatan penanggulangan lapangan penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
      m. menyiapkan kegiatan pemberian umpan balik penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
      n. menyiapkan kegiatan penilaian kegiatan pemberantasan penyakit Tular Vektor dan Zoonotik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
      o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
      p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
      q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
      r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
      s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
   b. membagi tugas kepada bawahan;
   c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
   d. memeriksa hasil kerja bawahan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
   f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
   h. menyiapkan kegiatan pengumpulan,pengolahan dan analisa data seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
   i. menyiapkan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
   j. menyiapkan kegiatan penyelidikan epidemiologi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
   k. menyiapkan kegiatan penanggulangan lapangan dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
   l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
   m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
   n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
   p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans;
   b. membagi tugas kepada bawahan;
   c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
   d. memeriksa hasil kerja bawahan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
   f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans;
   h. menyiapkan kegiatan perencanaan kebutuhan vaksin imunisasi dan melakukan koordinasi dengan instalasi farmasi terkait penerimaan dan pendistribusian vaksin imunisasi;

i. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi program Imunisasi, Kesehatan Haji, Program Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa;
j. menyiapkan kegiatan pelaporan program Imunisasi, Kesehatan Haji, Program Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans ;
m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
n. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans;
o. menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans ; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
a. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
b. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
c. Subkoordinator Jaminan Kesehatan dan Kemitraan .

a) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional;
h. menyiapkan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan tradisional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
i. menyiapkan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
j. menyiapkan kegiatan Akreditasi Sarana Kesehatan Primer;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;

o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
   b. membagi tugas kepada bawahan;
   c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
   d. memeriksa hasil kerja bawahan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
   f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
   h. menyiapkan kegiatan kajian data dan informasi tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan;
   i. menyiapkan kegiatan penjemputan pasien dengan kegawatdaruratan medis dan kegawatdaruratan maternal dengan ambulan ke rumah pasien yang bersangkutan untuk diantar ke rumah sakit tujuan;
   j. menyiapkan kegiatan pemberian pertolongan pertama dan stabilisasi pasien dan korban kegawatdaruratan sebelum diantar ke rumah sakit tujuan;
   k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
   l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
   m. menyiapkan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
   o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Jaminan Kesehatan dan Kemitraan mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan;
   b. membagi tugas kepada bawahan;
   c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
   d. memeriksa hasil kerja bawahan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
   f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan;
   h. menyiapkan kegiatan perencanaan pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
   i. menyiapkan kegiatan pedoman standar petunjuk pelaksanaan, teknis, prosedur tetap, pelayanan program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;

j. menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
k. menyiapkan kegiatan fasilitas program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
l. menyiapkan kegiatan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
m. menyiapkan kegiatan evaluasi dan pelaporan program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
n. menyiapkan kegiatan pengembangan jejaring kemitraan dengan organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan swasta;
o. menyiapkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan pendidikan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan institusi kesehatan melalui pemantapan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta pengembangan sarana metode dengan melaksanakan analisa dan evaluasi;
p. menyiapkan kegiatan koordinasi pelaksanaan, penerimaan studi komparasi bidang kesehatan;
q. menyiapkan kegiatan koordinasi pelaksanaan riset bidang kesehatan;
r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan;
s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan;
t. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan; menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
   a. Subkoordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
   b. Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan;dan
   c. Subkoordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan.

   a) Subkoordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas :
      a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
      b. membagi tugas kepada bawahan;
      c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
      d. memeriksa hasil kerja bawahan;
      e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
      f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
      g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;

h. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar dan kebutuhan;
i. menyiapkan kegiatan pemberian Rekomendasi Izin untuk industri kosmetik, pedagang besar farmasi cabang, penyalur alat kesehatan cabang, apotik, toko obat dan optik;
j. menyiapkan kegiatan pelayanan perizinan untuk industri rumah tangga alat kesehatan, industri rumah tangga perbekalan kesehatan rumah tangga, toko alat kesehatan, usaha mikro obat tradisional;
k. menyiapkan kegiatan pemberian sertifikat penyuluhan dan produksi pangan industri rumah tangga yang memenuhi syarat;
l. menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang meliputi Instalasi Farmasi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Ruang Obat Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, industri kosmetik, penyalur alat kesehatan cabang, industri rumah tangga alat kesehatan, industri rumah tangga perbekalan kesehatan rumah tangga, toko alat kesehatan, usaha mikro obat tradisional;
m. menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri rumah tangga pangan;
n. menyiapkan kegiatan penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, ijin iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar dan kebutuhan;
i. menyiapkan kegiatan penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;

j. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan;
k. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan dan pengembangan institusi kesehatan;
l. menyiapkan kegiatan Pemberian Rekomendasi Izin tenaga kesehatan yang meliputi Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anestesi, Apoteker, Tenaga Tehnik Kefarmasin, Fisioterapis, Terapi Wicara, Okupasi, Ortotik Prostetik, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Radiografer, Perekam Medis, Nutritionist, Refraksionis Option, Pengobat Tradisional, serta Tenaga Kesehatan Tradisional.
m. menyiapkan kegiatan pelayanan perizinan Tenaga Kesehatan yang meliputi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internship, Program Pendidikan Dokter Spesialis.
n. menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Tenaga Kesehatan yang meliputi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internship, PPDS, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anestesi, Apoteker, Tenaga Tehnik Kefarmasin, Fisioterapis, Terapi Wicara, Okupasi, Ortotik Prostetik, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Radiografer, Perekam Medis, Nutritionist, Refraksionis Option Dan Tenaga Kesehatan Tradisional dan Pengobat Tradisional;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan;
p. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
h. menyiapkan kegiatan pelayanan informasi dalam penyelenggaraan fungsi sumber daya kesehatan;
i. menyiapkan penghimpunan, pengolahan, analisa, dan penyajian data dan informasi yang berasal dari lintas program dan lintas sektor;
j. menyiapkan kegiatan penyiapan bahan media dan metode pelaksanaan penyebarluasan informasi;

k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis informasi dalam penyelenggaraan fungsi sumber daya kesehatan;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dalam penyelenggaraan bidang kesehatan;
m. menyiapkan kegiatan pembinaan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan;
n. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi Izin yang meliputi Klinik Pratama, Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C, Kelas D, Rumah Sakit Khusus, Klinik Utama, Laboratorium Kesehatan Swasta;
o. menyiapkan kegiatan pelayanan perizinan Sarana Kesehatan Rujukan yang meliputi Unit Hemodialisa, Penyelenggaraan Unit Radiologi dan Laboratorium Kalibrasi;
p. menyiapkan kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sarana Kesehatan Rujukan meliputi Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, Laboratorium Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Swasta, Rumah Sakit, Penyelenggaraan Unit Hemodialisa, Penyelenggaraan Unit Radiologi, Klinik Utama, Puskesmas, Klinik Pratama, Optik;
q. menyiapkan kegiatan penyusunan data informasi Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
r. menyiapkan kegiatan penyusunan data informasi Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
t. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan; dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7) Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro memiliki tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan pengelolaan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berikut Bagan Struktur Unit Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro:

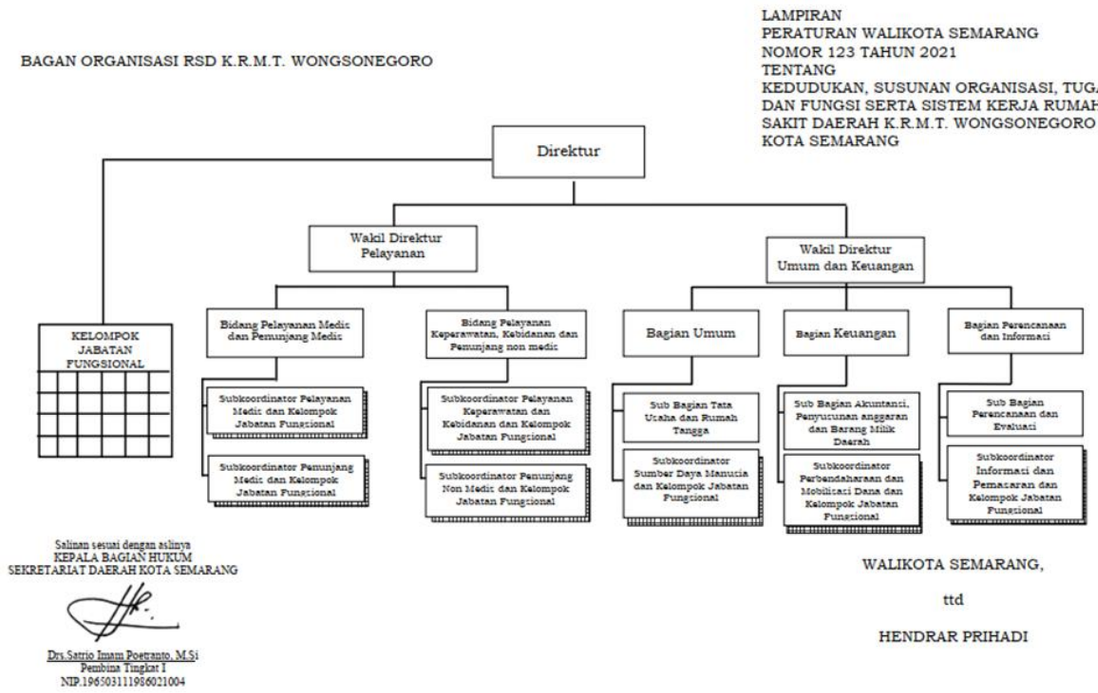

Gambar 2.2 Struktur Unit Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro

Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro membawahi beberapa jabatan struktural sebagaimana berikut:

a) Wakil Direktur Pelayanan
   a. Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Medis dan Pelayanan penunjang medis serta Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis;
   b. Wakil Direktur pelayanan diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya.
b) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
   a. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
   b. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri atas:
      - Subkoordinator Pelayanan Medis dan;
      - Subkoordinator Penunjang Medis.
   d. Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
   e. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
c) Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis
   a. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan serta Penunjang Non Medis;

b. Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis, terdiri atas:
   - Subkoordinator Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan: dan
   - Subkoordinator Penunjang Non Medis
d. Subkoordinator sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis;
e. Subkoordinator sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

d) Wakil Direktur Umum dan Keuangan
   a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bagian Umum, Bagian Keuangan serta Bagian Perencanaan dan Informasi;
   b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
e) Bagian Umum
   a. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Sub Bagian SDM;
   b. Kepala Bagian Umum diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. Pada Bagian Umum sebagaimana dimaksud, dibentuk:
      - Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
   d. Sub Bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;
   e. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dibentuk Subkoordinator Sumber Daya Manusia;
   f. Subkoordinator sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;
   g. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
f) Bagian Keuangan
   a. Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Sub Bagian Akuntansi, Penyusunan Anggaran dan Barang Milik Daerah serta Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
   b. Kepala Bagian Keuangan diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya;

c. Pada bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, dibentuk:
   - Sub Bagian Akuntansi, Penyusunan Anggaran dan Barang Milik Daerah.
d. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan;
e. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana dibentuk Subkoordinator Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
f. Subkoordinator sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan;
g. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

g) Bagian Perencanaan dan Informasi
a. Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi serta Informasi dan Pemasaran;
b. Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. Pada Bagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud, dibentuk:
   - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
d. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi;
e. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan Informasi dan Pemasaran dibentuk Subkoordinator informasi dan Pemasaran;
f. Subkoordinator sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi;
g. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
h. Berdasarkan aturan bahwa jabatan Subkoordinator tidak bisa diganti bila pejabatnya mutasi, promosi atau pensiun maka jabatan Subkoordinator tersebut diisi oleh Ketua Tim Kerja yang diangkat menggunakan dasar surat keputusan dari Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro.

h) Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan bagian tugas Rumah Sakit Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

i) Dewan Pengawas
Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk membantu Direktur mengawasi kegiatan operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kota Semarang.

8) Direktur RSUD Mijen berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang kesehatan. Dan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan

fungsi dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berikut Bagan Struktur Unit Organisasi RSUD Mijen:

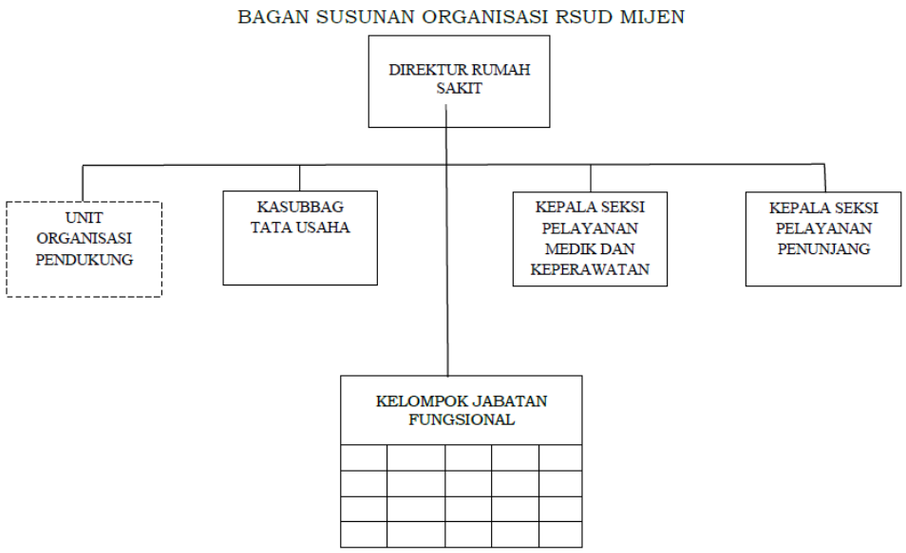

Gambar 2.3 Struktur Unit Organisasi RSUD Mijen

Direktur RSUD Mijen membawahi beberapa jabatan struktural sebagaimana berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Kasubag Tata Usaha mempunyai tugas meliputi:

a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas meliputi:

a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan;
b. menyusun bahan kebijakan Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan;

c. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dan pendistribusian tugas dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan pada instalasi rawat inap, gawat darurat dan rawat jalan;
e. melaksanakan koordinasi terkait pemenuhan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
f. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
g. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pelayanan Penunjang
Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelayanan penunjang.
Kepala Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas meliputi:
a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang;
b. menyusun bahan kebijakan Seksi Pelayanan Penunjang;
c. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. melaksanakan koordinasi pemeliharaan, perawatan, kalibrasi peralatan dan kegiatan penunjang medik lainnya;
e. melaksanakan koordinasi pemantauan, mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
f. menyusun kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik;
g. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medik di lingkungan Rumah Sakit;
h. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait di bidang penunjang medik berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
i. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9) Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi.

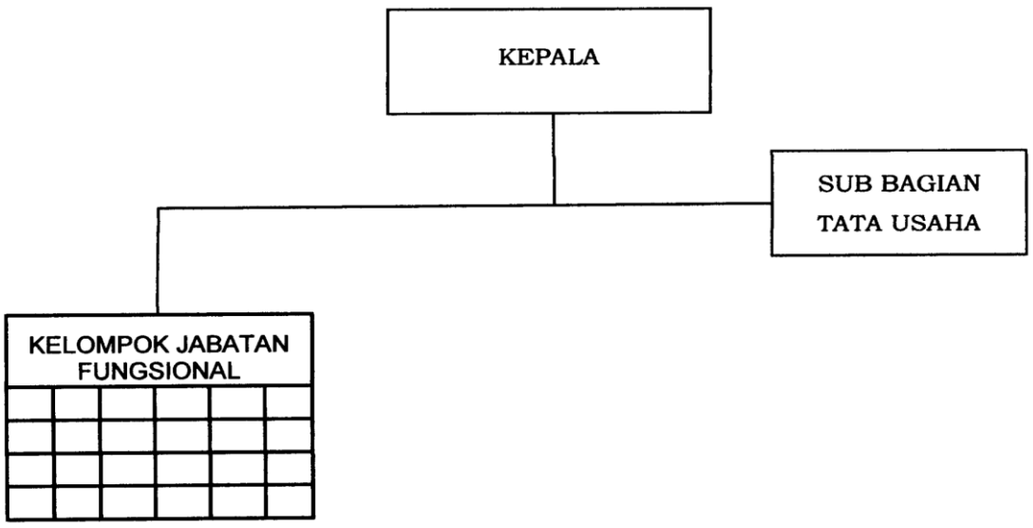

Gambar 2.4 Struktur Organisasi UPTD

10) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Kepala UPTD membawahi:
a) Kasub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan serta menjalani fungsi:
   a. penyiapan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
   b. Penyiapan kegiatan penyusunan kebijakan di UPTD Laboratorium Kesehatan;
   c. Penyiapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan;
   d. penyiapan kegiatan pembagian tugas kepada bawahan;
   e. penyiapan kegiatan bimbingan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
   f. penyiapan kegiatan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
   g. penyiapan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
   h. penyiapan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
   i. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD;
   j. Laboratorium Kesehatan;
   k. penyiapan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
   l. penyiapan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD Laboratorium Kesehatan;
   m. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
   n. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
   o. penyiapan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
   p. penyiapan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;

q. penyiapan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPTD;
r. Laboratorium Kesehatan;
s. penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPTD Laboratorium Kesehatan;
t. penyiapan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
u. penyiapan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
v. penyiapan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan;dan
w. penyiapan kegiatan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11) Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Mempunyai fungsi:
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas persetujuan pimpinan;
g. pelaksanaan penyusunan pedoman instalasi farmasi;
h. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan dan penerimaan perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi;
i. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi;
j. Pelaksanaan pencatatan dan pengamatan terhadap penerimaan, persediaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi;
k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pendistribusian dan penggunaan perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi;
l. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Instalasi Farmasi;
m. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi;
n. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Instalasi Farmasi;
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Instalasi Farmasi;
p. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi;
q. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Instalasi Farmasi;
r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Instalasi Farmasi;
s. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
u. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12) Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsinya.

13) Pelaksana Tata Usaha

Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan serta mempunyai fungsi:

a. penyiapan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
b. Penyiapan kegiatan penyusunan kebijakan di Puskesmas;
c. Penyiapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas;
d. penyiapan kegiatan fasilitasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
e. penyiapan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
f. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Puskesmas;
g. penyiapan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Puskesmas;
h. penyiapan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Puskesmas;
i. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
j. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Puskesmas;
k. penyiapan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
l. penyiapan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
m. penyiapan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Puskesmas;
n. penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Puskesmas;
o. penyiapan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
p. penyiapan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
q. penyiapan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
r. penyiapan kegiatan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas:

a. puskesmas pembantu; dan
b. puskesmas keliling.

Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas:

a. Klinik;
b. rumah sakit;
c. Apotek;
d. laboratorium; dan
e. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

2.1.2. Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan jabatan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	7	7	0	1	15
3	SMA Sederajat	26	28	8	12	74
4	D3	57	571	41	188	857
5	S1	98	616	40	84	838
6	S2	9	64	14	50	137
7	S3	1	0	0	0	1
	TOTAL	198	1.286	103	335	1.922

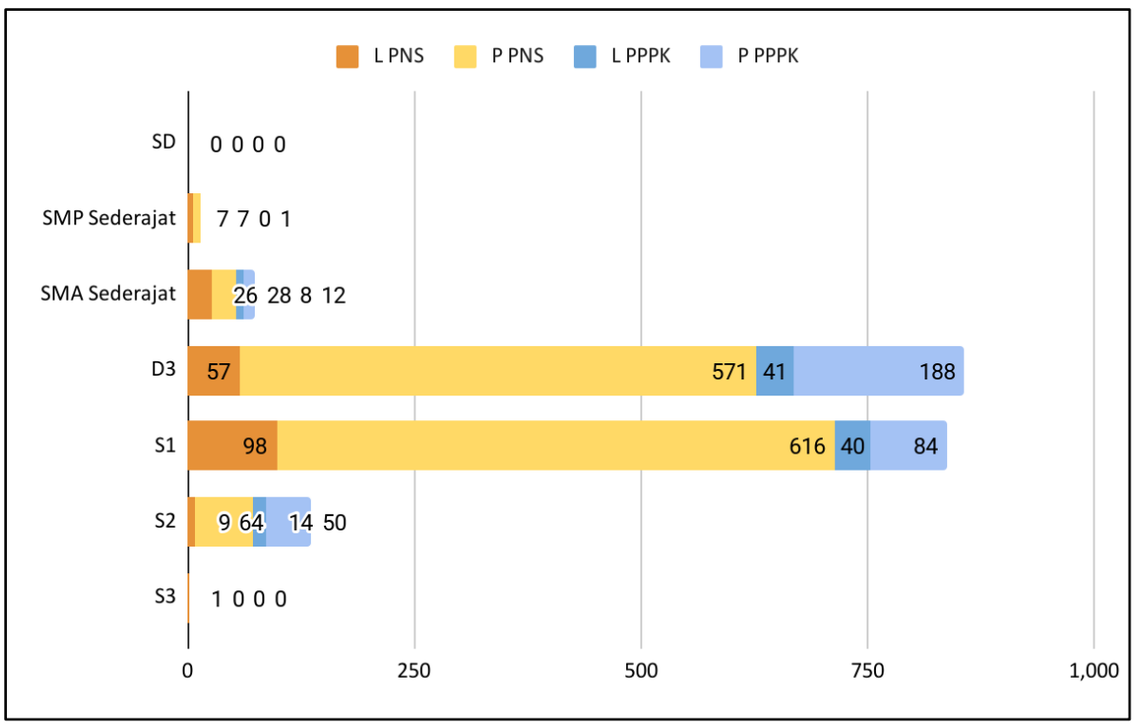

Gambar 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan sebanyak 1.922 orang terdiri dari 1.621 pegawai perempuan (84,3%) dan 301 pegawai laki-laki (15,7%). Komposisi ini menunjukkan dominasi pegawai perempuan di sektor kesehatan. Jumlah pegawai perempuan mendominasi terutama pada PNS dengan proporsi >80%. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Dinas Kesehatan berpendidikan D3 (857 orang) dan S1 (838 orang), dengan dominasi perempuan mencapai 88,6% di D3 dan 83,5% di S1, menunjukkan partisipasi perempuan masih dominan, keterwakilan perempuan cukup tinggi di level akademik. Jumlah pegawai yang melanjutkan pendidikan S2 masih rendah, baik laki-laki maupu perempuan.

Jumlah pegawai berpendidikan S2 hanya 137 orang (7,1% dari total pegawai), dan baru terdapat satu pegawai laki-laki dengan pendidikan S3. Untuk itu, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara responsif gender dengan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pengembangan kapasitas, promosi jabatan, serta pengambilan keputusan. Dinas Kesehatan juga berkomitmen mendukung peningkatan pendidikan pegawai, terutama mendorong pegawai perempuan melanjutkan ke jenjang S2/S3 agar mampu mengisi posisi strategis secara proporsional.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Unit Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		NON-ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	11	16	127	83	237
4	D3	39	140	123	264	566
5	D4	6	45	7	2	60
6	S1	80	192	110	173	555
7	S2	12	34	28	24	98
8	S3	0	1	1	0	2
	TOTAL	148	428	396	546	1518

Sumber data: Bagian Umum RSD K.R.M.T. Wongsonegoro (2024)

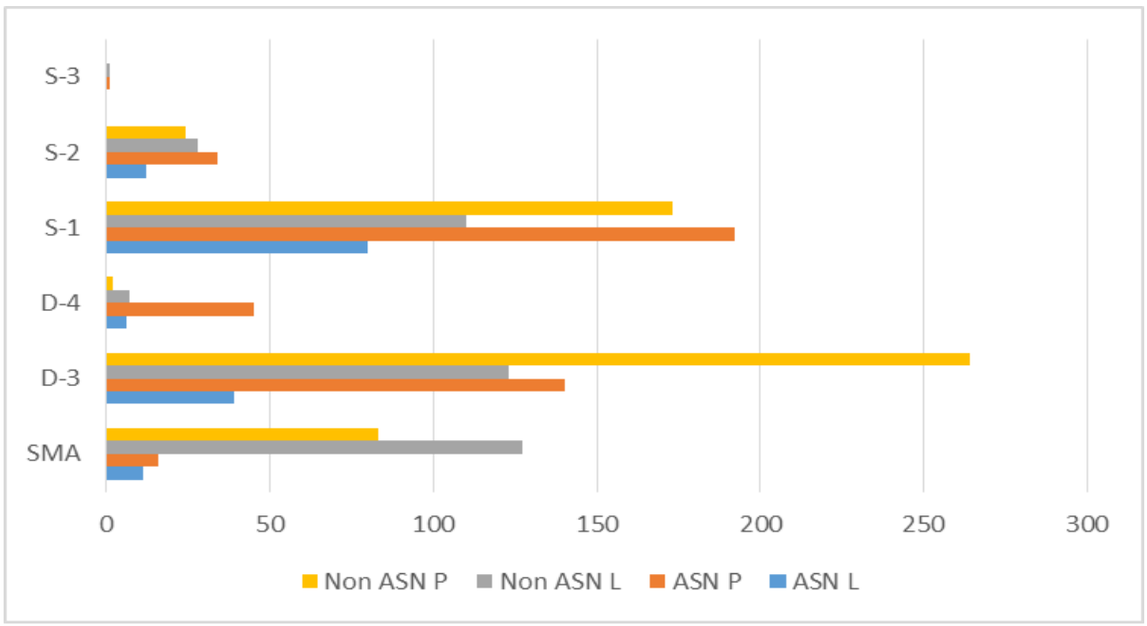

Gambar 2.6 Jumlah Pegawai RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebanyak 1518 orang terdiri dari 974 pegawai perempuan (64,16%) dan 544 pegawai laki-laki (35,83%). Komposisi ini menunjukkan dominasi pegawai perempuan. Jumlah Pegawai dengan status ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 576 pegawai dan Non-ASN (BLUD, Kontrak, Mitra) sebanyak 942 pegawai. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai RSD K.R.M.T. Wongsonegoro berpendidikan D3 (566 orang) dan S1 (555 orang), Jumlah pegawai yang melanjutkan pendidikan S2 masih rendah, baik laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2.3 Jumlah Dokter berdasarkan Status Pegawai di Unit Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2024

NO	KATEGORI JENIS	PNS	CPNS	NON PNS	PPPK	DOKTER MITRA	JUMLAH
1	Dokter Gigi	3		0		1	4
2	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	0		1			1
3	Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia	1					1
4	Dokter Konsultan Ginjal dan Hipertensi						0
5	Dokter Spesialis Anak	4		0	1	1	6

NO	KATEGORI JENIS	PNS	CPNS	NON PNS	PPPK	DOKTER MITRA	JUMLAH
6	Dokter Spesialis Emergensi dan Rawat Intensif Anak					1	1
7	Dokter Spesialis Anak Sub Spesialis Infeksi dan Pediatric Tropis					1	1
8	Dokter Spesialis Anesthesi	2		1		4	7
9	Dokter Spesialis Anesthesi Konsultan ICU (Sub Spesialis					1	1
10	Dokter Spesialis Bedah	3				0	3
11	Dokter Spesialis Bedah Sub Spesialis Bedah Digestif	0					0
12	Dokter Sub Spesialis Bedah Kepala Leher	1					1
13	Dokter Spesialis Bedah Orthopedi			2		1	3
14	Dokter Spesialis Forensik					2	2
15	Dokter Spesialis Gigi Anak	1					1
16	Dokter Spesialis Gizi Klinik	1					1
17	Dokter Spesialis Ilmu Bedah Saraf (Sp.B.S.)	1					1
18	Dokter Spesialis Bedah Saraf Sub Spesialis Neurovaskular					1	1
19	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah			1	1		2
20	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Kardiologi Intervensi					3	3
21	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1		1		2	4
22	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	1				1	2
23	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2		1			3

NO	KATEGORI JENIS	PNS	CPNS	NON PNS	PPPK	DOKTER MITRA	JUMLAH
24	Dokter Spesialis Mata	1		1		2	4
25	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik					1	1
26	Dokter Spesialis Urologi			0		1	1
27	Dokter Spesialis Obsgyn	2		1			3
28	Dokter Spesialis Obsgyn Sub Spesialis Obstetri Sosial	1					1
29	Dokter Spesialis Obsgyn Sub Spesialis Fertilitas	1					1
30	Dokter Spesialis Paru	2					2
31	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0					0
32	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1					1
33	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4		1	1	2	8
34	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Sub Spesialis Endokrin-Metabolik-Diabetes	1					1
35	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Sub Spesialis Hematologi Onkologi Medik					1	1
36	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Sub Spesialis Ginjal dan Hipertensi	1					1
37	Dokter Spesialis Bedah Sub Spesialis Bedah Onkologi					1	1
38	Dokter Spesialis Radiologi	2		1		1	4
39	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1		0	1	1	3
40	Dokter Spesialis Saraf / Neurologi	3		2		1	6
41	Dokter Spesialis THT	1				1	2

NO	KATEGORI JENIS	PNS	CPNS	NON PNS	PPPK	DOKTER MITRA	JUMLAH
42	Dokter Spesialis THT Sub Spesialis Laring Faring					1	1
43	Dokter Spesialis THT-KL			0		1	1
44	Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular			1		0	1
45	Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut					1	1
46	Dokter Spesialis Bedah Anak			0		1	1
47	Dokter Spesialis Onkologi Radiasi			1			1
48	Dokter Umum	9		20	5	3	37
Total		51	0	35	9	38	133

Sumber data: Bagian Umum RSD K.R.M.T. Wongsonegoro (2024)

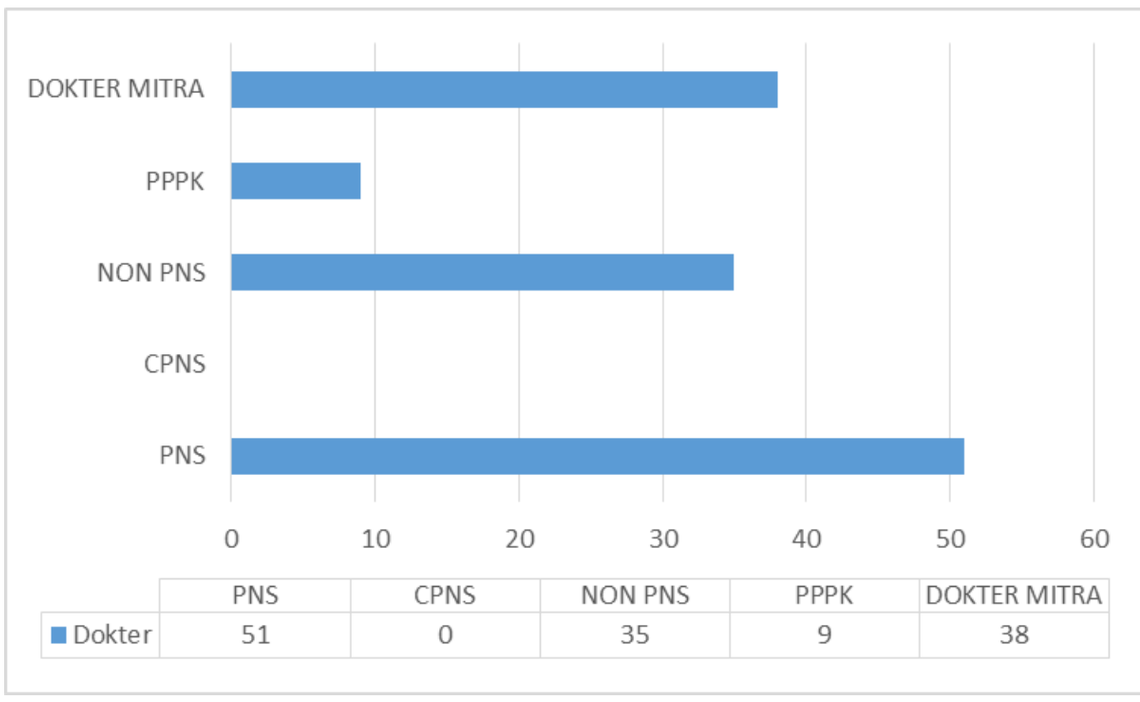

Gambar 2.7 Jumlah Dokter RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan data di atas, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro memiliki 133 dokter, di mana terdiri dokter umum hingga sub-spesialis. Dokter dengan status ASN berjumlah 60 orang. Dokter dengan status pegawai BLUD dan Mitra berjumlah 73 orang.

Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
	PNS	198	1.286	1.484
1	Golongan II	45	341	386
2	Golongan III	122	787	909
3	Golongan IV	31	158	189
	PPPK	103	335	438
1	Golongan III	0	1	1
2	Golongan V	8	12	20
3	Golongan VII	41	187	228
4	Golongan IX	32	74	106
5	Golongan X	22	61	83
	Total	301	1.621	1.922

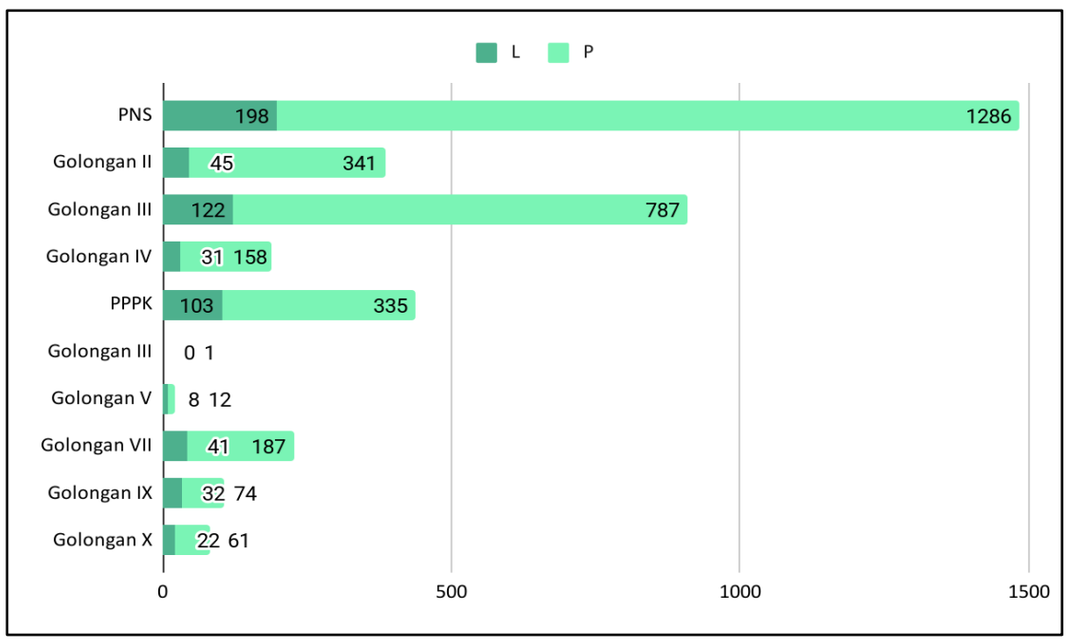

Gambar 2.8 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang Berdasarkan Golongan

Berdasarkan gambar 2.8 jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai golongan III mendominasi dengan jumlah terbanyak dengan jumlah pegawai perempuan 787 orang dan laki-laki 122 orang. Komposisi pegawai golongan III didominasi perempuan (86,6%), mencerminkan tingginya partisipasi perempuan dalam layanan kesehatan. Secara keseluruhan pegawai Dinas Kesehatan sangat didominasi oleh pegawai perempuan, hal ini umum terjadi pada sektor kesehatan karena banyaknya posisi tenaga kesehatan seperti

perawat, bidan ataupun tenaga administrasi lainnya diisi oleh perempuan. Dinas Kesehatan berkomitmen mewujudkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam rekrutmen pegawai.

b. Sarana Prasarana

Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di tingkat kota, senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana Dinas Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dinas Kesehatan memiliki Aset tanah dan bangunan Dinas Kesehatan mencakup gedung kantor utama beserta lahan pendukung, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), gudang farmasi, laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), serta berbagai rumah dinas tenaga kesehatan. Aset-aset tersebut berfungsi sebagai sarana strategis untuk penyelenggaraan layanan kesehatan dan mendukung kegiatan operasional.

Selain itu, Dinas Kesehatan membina dan mengoordinasikan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah kerja, antara lain puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan posyandu. Sarana tersebut berfungsi sebagai ujung tombak layanan kesehatan primer, baik upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Untuk mendukung jangkauan pelayanan, tersedia mobil puskesmas keliling, ambulans, serta kendaraan dinas bagi petugas lapangan. Fasilitas penunjang teknis seperti Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan gudang farmasi juga dimiliki untuk menjamin mutu pelayanan. Labkesda digunakan untuk pemeriksaan kualitas air, makanan, dan penyakit menular, sedangkan gudang farmasi dilengkapi sistem rantai dingin (*cold chain*) untuk penyimpanan vaksin dan obat-obatan.

Secara umum, sarana prasarana yang dimiliki telah mendukung pelaksanaan program kesehatan, namun beberapa fasilitas memerlukan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi agar sesuai standar pelayanan minimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kesehatan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai beriku

Tabel 2.5 Aset Tanah Dinas Dinas Kesehatan

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M^2)	Tahun pengadaan	Letak /Alamat	Status			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	361,00	1990	Taman Satio Manah 2 Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan	Hak Pakai			RUMDIN TENAGA MEDIS	PEMBELIAN	74.366,00	
2	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.400,00	1980	Jl. Meranti Raya no.389 Kel.Padangsari kec.Banyumanik	Hak Pakai	30/04/2007	HP 5	Pusk Padangsari	PEMBELIAN	882.506,18	
3	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	255,00	1980	Jl. Meranti Raya no 305 Kel.Padangsari Kec.Banyumanik	Hak Pakai			Rumdin Bidan	PEMBELIAN	22.962,62	rumdin bidan
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	357,00	1980	Jl. Meranti Raya no 307 kel..Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Rumdin Dokter	PEMBELIAN	32.147,67	rumdin dokter
5	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	297,00	1980	Jl. Meranti Raya no306 Kel.Padangsari Kec.Banyumanik	Hak Pakai			rumdin dokter gigi	PEMBELIAN	26.744,70	rumdin dokter gigi
6	Tanah Kaveling (dst)	2.500,00	1985	Jl. Irigasi Mangkang kulon kel.mangkang kulon kec.tugu	Hak Pakai		HP 24	Pusk Mangkang	PEMBELIAN		
7	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	1.220,00	1996	Jl. Imam Suprapto kel.Bulusan Kec.Tembalang	Hak Pakai	17/03/2000	HP 2	Pustu Bulusan	PEMBELIAN	100.000,00	Sudah Sertifikat
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.220,00	2005	Jl. Raya Rowosari Kel.Rowosari Kec.Tembalang	Hak Pakai	22/11/2005	HP4	Pustu Krajan	PEMBELIAN	150.000,00	Sudah Sertifikat
9	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.668,00	1960	Jl.Mr Wuryanto, Kel Sumurrejo	Hak Pakai			Pustu Sumurrejo	PEMBELIAN	345.750,00	
10	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.807,00	1974	Jl. Taman Lebdosari Semarang, RT.07, RW.06, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec.Semarang Barat	Hak Pakai	30/04/2007	HP 22	Pusk Lebdosari	PEMBELIAN	389.300,00	Dan Rumah Dinas Dokter, Perawat/ Bidan
11	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.180,00	1976	Jl. Abdulrahman Saleh 267 Semarang Kel.Kembangarum Kec.Semarang Barat	Hak Pakai	17/11/2005	HP 8	Pusk Manyaran	PEMBELIAN	2.125.000,00	SERTIFIKAT

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M^2)	Tahun pengadaan	Letak /Alamat	Status			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	6.971,00	1977	Jln. RM Hadi Soebeno S No 146 -148 Kelurahan Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang	Hak Pakai	24/08/2007	00042	Puskesmas Induk rencana jadi RS	PEMBELIAN	1.785.000,00	1 rumah dinas dokter,1 rumah dinas dokter gigi, 1 rumah dinas perawat/bidan untuk Pusk. Induk Mijen
13	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	480,00	1977	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel.Mangkang Kulon Kec.Tugu	Hak Pakai	17/11/2005	HP 3	Pusk Mangkang	PEMBELIAN	480.000,00	
14	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2490,00	1980	JALAN RADEN PATAH No. 178 SEMARANG kel.Rejo mulyo kec.Semarang Timur	Hak Pakai	18/05/2006	HP 20	Puskesmas Karangdoro dan Labkes	PEMBELIAN	3.042.320,00	gedung rawat jalan,rawat inap, aula, dan gedung lab air/kesh
15	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	246.185,00	1980	Jl. Cumi - cumi raya RT 07 RW IV Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara	Hak Pakai	26/12/1990	HP 26	Puskesmas Pembantu Cumi	PEMBELIAN	97.920,00	Nginduk pd HP 26
16	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.181,00	1982	Jl. Taman Seteran Barat No. 3 Semarang Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah.	Hak Pakai			Puskesmas Miroto	PEMBELIAN	468.695,00	Kurang Baik
17	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	4.497,00	1982	Jl. Raya Walisongo Km. 09 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Semarang	Hak Pakai	29/01/1998	HP 7	Puskesmas Tambakaji	PEMBELIAN	3.057.960,00	
18	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	493,00	1982	Jalan Gondoriyo, Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Semarang	Hak Pakai	04/07/2007	HP 2	Pusk Ngaliyan	PEMBELIAN	14.480,00	
19	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.920,00	1982	Jln.Raya Muntal-Patemon RT.02/RW.05 Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati	Hak Pakai		-	Pustu Patemon	Pembelian	288.000,00	Tanah Pustu Patemon
20	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	4.667,00		Jl. Wolter Monginsidi RT 02 RW I Kelurahan Bangetayu Wetan	Hak Pakai			Puskesmas Induk	PEMBELIAN	2.181.823,00	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M^2)	Tahun pengadaan	Letak /Alamat	Status			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	351,00		Jl. Srinindito IV RT 08 RW I Kelurahan Ngemplak Simongan Semarang Kec.Semarang Barat	Hak Pakai	23/04/2007	HP 14	Gedung Puskesmas Ngemplaksimongan	PEMBELIAN	158.355,00	Tempat sendiri
22	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	791,00	1985	Jl.Siliwangi No.572 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan	Hak Pakai	17/11/2005	HP 5	Kantor Puskesmas Purwoyoso	Hibah	150.000,00	
23	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.835,00	1987	JL.Tirto Karanganyar No.29E, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarangng	Hak Pakai	05/12/2007	HP 21	Puskesmas Karanganyar	PEMBELIAN	1.273.725,00	
24	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.615,00	1990	Taman Satrio Manah 2 Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan	Hak Pakai			PUSKESMAS INDUK	PEMBELIAN	538.690,00	
25	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	987,00	1990	Jl. Tegalsari RT.02/7 kel.Tegalsari Kec.Candisari	Hak Pakai	08/02/2006	HP 18	Puskesmas Pembantu Tegalsari	PEMBELIAN	150.000,00	
26	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	905,00	1990	JL IMAM BONJOL NO 114 SEMARANG Kel.Sekayu ,kec.Semarang Tengah	Hak Pakai	22/11/2005	HP 20	Pusk Poncol	Hibah	540.000,00	
27	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.217,00	2001	Jl.Teuku Umar no.271 Semarang Kel.ngesrep Kec.Banyumanik	Hak Pakai	16/05/2001	11.01.06.08.4.0052	Pusk Ngesrep	PEMBELIAN	2.040.000,00	
28	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	983,00	2003	Jl. Pedurungan Tengah XII	Hak Pakai		011	pustu kekancan mukti	Hibah	208.000,00	pustu kekancan mukti
29	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	684,00	2005	Jl. Ksatrian No. 18 Kel Jatingaleh, Kec Candisari.	Hak Pakai	22/11/2005	HP 13	Pustu Jangli	Hibah	724.513,85	
30	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	3.020,00	2006	Jl Halmahera Raya No. 38 Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Semarang	Hak Pakai	27/07/2006	HP 17	Gedung Induk	PEMBELIAN	3.126.300,00	
31	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	3.332,00	2010	Jl.Cikurai Kp.Kalilangse RT04 RW03 Kel.Gajah Mungkur Kec. Gajah Mungkur	Hak Pakai			Pustu Gajah Mungkur	HIBAH	101.000,00	Puskesmas Pembantu

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M^2)	Tahun pengadaan	Letak /Alamat	Status			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.185,00	2010	Jln. Gebang Anom Raya No 24 kel Gebangsari Kec Genuk Semarang	Hak Pakai	24/06/2009	HP 11	Puskesmas Pembantu	Hibah	774.000,00	
33	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.420,00	2010	Jl Setiabudi No 209 Semarang Kel.Srondol Kulon Kec.Banyumanik	Hak Pakai	30/04/2007	HP 23	PUSKESMAS SRONDOL	PEMBELIAN	1.188.300,00	Sudah Sertifikat
34	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.587,00	2010	Jl Klipang Raya Rt.01 Rw.01, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	Hak Pakai			Gedung Puskesmas Pembantu Sendangmulyo	HIBAH	455.500,00	belum ada sertifikat
35	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	408,00	1982	Jln. Genuksari RT 5 / RW 1 Kel Genuksari Kec Genuk Semarang	Hak Pakai	22/11/2005	HP 5	Puskesmas Induk	Hibah	67.275,00	
36	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	669,00	1983	Dukuh Kaliancar Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Semarang	Hak Pakai	30/04/2007	HP 32	Pusk Ngaliyan	PEMBELIAN	20.967,04	
37	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.754,00	1984	Jl. Raya Pongangan, Kel Pongangan	Hak Pakai	24/08/2007	HP 17	Pustu Pongangan	PEMBELIAN	227.253,00	
38	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.560,00	1985	Jl. Laut Mangunharjo kel.mangunharjo kec.tugu	Hak Pakai	30/04/2007	HP 8	Pusk Mangkang	PEMBELIAN	780.000,00	
39	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	624,00	1990	Taman Satrio Manah 2 Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan	Hak Pakai			RUMDIN DOKTER	PEMBELIAN	128.544,00	
40	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.542,00	1991	Jln.Rambutan No.44,Rt. 02 Rw.03 sekaran, Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Gunungpati	Hak Pakai	27/07/2006	HP 17	Puskesmas Sekaran	PEMBELIAN	793.900,00	Tanah Puskesmas Sekaran
41	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	336,00	1993	Manyaran , Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai	24/06/2005	HP 59	Pustu Panjangan	PEMBELIAN	293.940,00	SERTIFIKAT
42	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	246,00	1993	Jl. Boom Lama RT 07 RW III Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara	Hak Pakai	08/06/2007	HP 5	Puskesmas Pembantu Kuningan	PEMBELIAN	39.360,00	
43	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	388,00	1994	Jl. Telomoyo No.3 Kel Wonotingal Kec.candisari	Hak Pakai	15/09/2005	HP 23	Puskesmas Kagok (Induk)	PEMBELIAN	900.000,00	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M^2)	Tahun pengadaan	Letak /Alamat	Status			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	227,00	2000	Jl Lamongan No 02 Kel.Sampangan Kec.Gajah Mungkur	Hak Pakai	29/11/2000	HP 8	Puskesmas Pegandan	PEMBELIAN	58.905,00	Ditempatkan di UPTD
45	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	960,00	2003	Jln. Kuripan RT 01 RW 01 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang	Hak Pakai	28/03/2007	HP 18	Pustu Wonolopo	PEMBELIAN	120.000,00	
46	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.425,00	2005	Jl. Banjardowo- Kudu Kel. Karangroto	Hak Pakai	30/04/2007	HP 3	Puskesmas	PEMBELIAN	324.300,00	
47	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.365,00	2005	Jl. DR. Wahidin No. 22 Kel Jomblang, Kec Candisari	Hak Pakai	09/08/2005	HP 12	Pusk Induk Candilama	Hibah	1.445.850,00	
48	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.087,00	2007	Jl. Sri Rejeki Raya Gisik Drono Semarang Barat	Hak Pakai	30/04/2007	HP 43	Pustu Gisikdrono	PEMBELIAN	230.987,50	
49	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	539,00	2007	Jl. Plamongansari V	Hak Pakai		002	Pustu plamongansari	Hibah	30.000,00	pustu plamongan sari
50	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.815,00	2010	Jl Sambiroto Asri Raya, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang , Kota Semarang	Hak Pakai			Gedung Puskesmas Pembantu Sambiroto	PEMBELIAN	721.700,00	blm ada sertifikat
51	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	80,00	1982	Muktiharjo RT 2 / RW 3 Kelurahan Muktiharjo Lor Kec Genuk Semarang	Hak Pakai			Puskesmas Pembantu	Hibah	22.425,00	
52	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.087,00	1985	Desel, Kel Sadeng	Hak Pakai	30/04/2007		Pustu Sadeng	PEMBELIAN	157.335,00	
53	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	749,00	1990	Sekar Jagat Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan	Hak Pakai			TANAH KOSONG	PEMBELIAN	154.290,00	
54	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	3.096,00	1993	Jalan Wismasari Raya Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan Semarang	Hak Pakai	05/12/2007	HP 41	Pusk Ngaliyan	PEMBELIAN	54	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
55	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	735,00	1993	Jl. Layur RT 05 RW IV Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara	Hak Pakai	03/04/2006	HP 9	Puskesmas Induk Bandarharjo	PEMBELIAN	55	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M^2)	Tahun pengadaan	Letak /Alamat	Status			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.800,00	2003	Kaligetas Rt 05 RW 04 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang	Hak Pakai	22/09/2005	HP 1	Pustu Jatibarang	PEMBELIAN	56	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
57	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	365,00	2007	Jl. plamongan larasati	Hak Pakai		007	pustu pedurungan kidul	Hibah	57	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
58	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	953,00	2007	Jl Mangunharjo Raya no 21,Kelurahan Mangunharjo,Kecamatan tembalang,Kota Semarang	Hak Pakai	30/04/2007	HP 8	Gedung Puskesmas Pembantu Mangunharjo	PEMBELIAN	58	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
59	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.570,00	2007	Jl. Raya Kudu RT 02 RW VII Kel. Karangroto	Hak Pakai	17/11/2005	HP 1	Puskesmas Kudu	PEMBELIAN	59	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
60.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	3.124,00	1976	Jl Sambiroto RT 001/RW 001,Kelurahan Sambiroto,Kecamatan Tembalang Semarang	Hak Pakai	24/06/2005	HP 3	Gedung Puskesmas Kedungmundu	PEMBELIAN	60.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
61	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.200,00	1979	Jl. arteri sukarno hatta kel. tlogosari kulon	Hak Pakai			Puskesmas Induk Tlogosari Wetan	Hibah	61	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
62	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.234,00	1987	Jl. Mr Wuryanto, Kel Plalangan	Hak Pakai			Puskesmas Gunungpati	PEMBELIAN	62	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
63	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	600,00	1992	Taman Ratu Ratih Kel.Tlogosari kulon Kec.Pedurungan	Hak Pakai			PUSTU RATU RATIH	PEMBELIAN	63	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
64	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.300,00	2003	Wonorejo Rt 02 RW 02 Kelurahan Pesantren	Hak Pakai	22/12/2005	HP 2	Pustu Pesantren	PEMBELIAN	64	Tanah Bangunan

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M^2)	Tahun pengadaan	Letak /Alamat	Status			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kecamatan Mijen Kota Semarang							Puskesmas/ Posyandu
65	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	469,00	1991	Jl Sendangguwo Raya, kelurahan endangguwo, kecamatan Tembalang, Kota Semarang	Hak Pakai	24/06/2005	HP 7	Gedung Puskesmas Pembantu Sedangguwo	PEMBELIAN	140.700,00	
66	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	600,00	1992	Taman Suryo Kusumo Kel.Muktiharjo Kidul Kec.Pedurungan	Hak Pakai			PUSTU MUKTIHARJO KIDUL	PEMBELIAN	125.610,00	
67	Tanah Kampung	1.705,00	1945	Jl. Pandanaran No. 79 kel.Randusari kec.Semarang Selatan	Hak Pakai	18/02/1999	HP 11	PUSKESMAS INDUK DAN KANTOR DKK	PEMBELIAN	10.983.700,00	
68	Tanah Kampung	2.140,00	1980	JL RM Soebagyono Tjondro K Karangmalang Mijen Semarang Kel.Karangmalang Kec.Mijen	Hak Pakai	29/12/2005	HP 2	Puskesmas Karangmalang	PEMBELIAN	163.000,00	Untuk puskesmas dan rumah dinas
69	Tanah Kampung	427,00	1987	Jl.Kenconowungu III/28 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai	30/11/2000	HP 2	Pusk Karangayu	PEMBELIAN	272.000,00	Keadaan baik
70	Tanah Kampung	567,00	1990	Jl. Banowati Selatan II Semarang kel. Bulu Lor kec. Semarang Utara	Hak Pakai	06/05/2007	HP 14	Puskesmas Induk	PEMBELIAN	150.000,00	
71	Tanah Kampung	998,00	1992	Jl. Lamper Tengah Gang XV Kel. Lamper Tengah Kec.Semarang Selatan	Hak Pakai	18/05/2006	HP 2	Puskesmas Lamper Tengah	PEMBELIAN	300.000,00	
72	Tanah Kampung	254,00	1994	Jl. Badak V RT 011 RW 006 Kel. Pandeanlamper Kec. Gayamsari	Hak Pakai	14/12/2020	HP 17	Pustu Pandeanlamper	PEMBELIAN	213.900,00	Bersertifikat
73	Tanah Kampung	1.485,00	2000	Jl. Payung Asri Semarang Kel.Pudak payung Kec.Banyumanik	Hak Pakai	30/11/2000	HP 11	Puskesmas Pudakpayung	PEMBELIAN	725.075,00	OPD Pengguna saat ini Gedung DKK
74	Tanah Kampung	480,00	2004	JL.Aribuana No.1 Kelurahan Krobokan, Kec. Semarang Barat;	Hak Pakai	24/06/2005	HP 10	Puskesmas Krobokan	PEMBELIAN	158.355,00	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M^2)	Tahun pengadaan	Letak /Alamat	Status			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Tanah Kampung	230,00	1990	Jl. Brotojoyo Panggung Kidul, Kelurahan Panggung kidul Kecamatan Semarang	Hak Pakai			Puskesmas Pembantu	PEMBELIAN	101.722,83	
76	Tanah Kampung	260,00	2009	Utara Sawah Besar XIII kel. Kaligawe Kec. Gayamsari	Hak Pakai	23/08/2007	HP 02	PUSTU KALIGAWE	PEMBELIAN	59.900,00	Bersertifikat
77	Tanah Kampung	1.248,00	2018	Jl.Musi Raya Rt08 Rw 04 Kelurahan bugangan Kecamatan Semarang timur	Hak Pakai	16/01/2019	00023	Puskesmas Bugangan	Pembelian	4.368.000,00	Relokasi Puskesmas Bungangan th 2018
78	Tanah Kampung	742,00	1991	Jl.Slamet Riyadi 4 A Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	Hak Pakai	24/06/2005	HP 16	Puskesmas Gayamsari	PEMBELIAN	362.950,00	Bersertifikat
				Jumlah Harga						57.957.908,38	

Aset Tanah RSD K.R.M.T. Wongsonegoro

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M^2)	Tahun pengadaan	Letak /Alamat	Status			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Kampung	80.500,00	1990	Jl Fatmawati No.1 , Mangunharjo, Tembalang	Hak Pakai	12/08/2021	00021	RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	Hibah	61.285.300,00	Tanah jalan diluar pagar +/- 1.700m^2 belum jadi sertifikatnya .

Aset tanah Dinas Kesehatan Kota Semarang menunjukkan inventaris yang beragam, mencakup tanah puskesmas/posyandu, kantor pemerintah, gudang, mess/wisma/asrama, dan rumah dinas. Aset-aset ini memiliki luasan yang bervariasi, mulai dari yang terkecil 80 m^2 hingga yang terbesar 246.185 m^2. Akuisisi aset ini dilakukan sepanjang rentang waktu yang panjang, dengan tahun pengadaan yang tercatat dari 1960 hingga 2010. Sebagian besar aset terletak di berbagai kelurahan di Semarang, dengan status kepemilikan dominan berupa Hak Pakai. Aset tersebut difungsikan untuk beragam kegunaan, seperti kantor puskesmas/posyandu, rumah dinas bagi tenaga medis (dokter dan bidan), gudang, dan kantor pemerintahan. Berdasarkan asal usulnya, aset-aset ini didapatkan melalui dua cara utama yaitu hibah dan pembelian dengan harga yang

mengikuti NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di tahun pengadaan. Harga akuisisi aset ini beragam, mulai dari Rp 14.480,00 hingga Rp 3.126.300,00, mencerminkan nilai yang berbeda-beda tergantung pada jenis, lokasi, dan tahun perolehannya.

Tabel 2.6 Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai ($M^{2)}$	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai ($M^{2)}$	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	200	Jl. Payung Asri, Pudakpayung, Banyumanik				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	74.725,00	07.01.29.00 (TALUT)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Bertingkat	beton	736	Jl. Prof. Soeharso, Meteseh, Tembalang	05/12/2022	B/243.11/800/2022		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	4.359.684,41	07.01.25.00 (Gedung Puskesmas Rowosari/Metese h)
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Beton	80	JLN.RAMBUTAN NO 44 SEKARAN	17/12/2020			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	138.530,00	AULA OUTDOOR/BLUD
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	660	Jl. Plamongansari				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	4.590.439,58	Puskesmas Plamongansari
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	463	Jln. RM Hadi Soebeno no 146-148 Mijen Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.317.780,92	07.01.32.00 (Gedung Puskesmas)
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	400	Jl.Taman Seteran Barat no.03				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.060.348,65	07.01.03.00 (Gedung Puskesmas)
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Tidak	64	Jl. Meranti Raya No. 389 Banyumanik	07/12/2021			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	146.000,00	Gedung Ruang Administrasi dan Kepala Puskesmas
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	299	JL Gebang anom Gebangsari				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	373.494,32	07.01.20.02 (Bangunan Pustu Gebangsari)
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	tidak bertingkat	tidak beton	567	Puskesmas Bulu Lor (Jl. Banowati Selatan II)				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	76.142,34	07.01.05.00 (Gedung dan bangunan)
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak		110	puskesmas Pembantu siwalan	31/12/2014			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	80.863,99	Kunstroksi bangunan puskesmas dr DKK

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	Tidak	tidak beton	400	Lamper Tengah Gg XV				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.034.343,59	07.01.10.00(Gedung Puskesmas Lamper Tengah)
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Bertingkat	tidak beton	110	Jl Jolotundo				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	325.080,18	07.01.16.02 (Gedung Puskesmas Pembantu Siwalan)
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	927.74	jl. Musi Raya 22				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.340.548,89	-
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	3300	JL TIMOHO BULUSAN				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	171.903,05	-
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	48	Jl. Payung Mas Raya Pudakpayung				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	4.749.473,49	07.01.29.00 (Gedung Puskesmas Pudak Payung)
16	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	180	-jln.meranti raya 389 semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	87.761,00	Aula Outdoor
17	Bangunan Gedung Instalasi Darurat	Baik	Tidak	tidak beton	180	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	20.330,00	07.01.23.00 (Gedung tindakan medik)
18	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	200	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	16.264,00	07.01.23.00 (Gedung rontgen)
19	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	1350	PUSKESMAS BULU LOR BANOWATI SELATAN II	22/12/2022			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	192.000,00	IPAL PEMBELIAN (BLUD)
20	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Bertingkat	Beton	200	Jl. Mr Wuryanto 38 Kel. Plalangan Gunungpati				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	182.349,00	07.01.30.00 (Rumah Dinas Bidan)
21	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	tidak bertingkat	tidak beton	240	jl.halmahera raya no.38 kelurahan karang tempel kecamatan semarang timur				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	5.396.018,27	07.01.06.00 (GEDUNG PUSKESMAS)
22	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	900	Jl. Wr. Supratman				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	618.605,89	07.01.12.00 (Gedung Puskesmas Pembantu)
23	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Bertingkat	tidak beton	202.27	Jln. RM Hadi Soebeno no 146-148 Mijen Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	158.400,00	07.01.32.00 (Rawat Inap dengan UGD)
24	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tingkat	tidak beton	230	jl setiabudi 209				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.292.504,43	07.01.28.00 (Gedung Puskesmas)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	383.755	Jl Wismasari Raya				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.947.788,59	07.01.36.00 (Gedung Puskesmas Ngaliyan)
26	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Bertingkat	Beton	200	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	187.036,00	07.01.23.00 (Gedung perawatan 1)
27	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Bertingkat	Beton	110	JLN.RAMBUTAN 44 SEKARAN				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	199.085,67	07.01.31.00 (Rehab puskesmas Sekaran)
28	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak Bertingkat	tidak beton	927.74	Jl. Telomoyo No 3, Wonotingal, Candisari				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.115.104,37	07.01.18.00 (Gedung Puskesmas)
29	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Bertingkat	Beton	110	Jl.Jabungan Raya	13/08/2018	050/8980A		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	932.201,79	Pembangunan DKK(Pustu Jabungan)
30	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	387	Jl. Urip Sumoharjo KM 15				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	777.871,53	07.01.37.00 (Gedung Rawat Inap Puskesmas Mangkang)
31	Bangunan Klinik/Puskesmas	Kurang Baik	Tidak	tidak beton	200	Jl.Tirto Karanganyar No.29E, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu - Kota Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	57.600,00	07.01.38.00 (Rumah dinas dokter)
32	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	185.16	Genuk Baru RT 02/ RW 07 Tegalsari, Candisari				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	465.210,74	07.01.18.00 (Gedung Puskesmas Pembantu Tegalsari)
33	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Bertingkat	Beton	200	JLN.PATEMON-GUNUNG PATI				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	199.909,67	07.01.31.00 (Rehab pustu patemon)
34	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	322	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	261.850,40	07.01.23.00 (Gedung perawatan 2)
35	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	tidak	tidak beton	260	Jl Wismasari Raya				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	800.869,80	07.01.36.00 (Gedung Puskesmas Rawat Inap)
36	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	240	Jln. RM Hadi Soebeno no 146-148 Mijen Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	244.800,00	07.01.32.00 (Rawat Inap)
37	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	tidak bertingkat	tidak beton	660	Jl. Taman Lebdosari Rt 7 Rw 6				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	538.285,54	07.01.12.00 (Gedung Puskesmas)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	266	Jl. Mr Wuryanto 38 Kel. Plalangan Gunungpati				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	998.294,77	07.01.30.00 (Gedung UGD)
39	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	120	Wonorejo RT 2/ 2 Pesantren Mijen				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	227.698,54	07.01.32.00 (Gedung Pustu Pesantren)
40	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	tidak	tidak beton	200	Jl Wismasari Raya				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	44.880,00	07.01.36.00 (Ruang Tunggu Pasien)
41	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	280	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.704.984,27	07.01.23.00 (Gedung puskesmas pelayanan)
42	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	120	Jl. Ratu Ratih				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	447.236,10	07.01.23.01 (Pustu Ratu Ratih)
43	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Bertingkat	Beton	392	Jl. Telomoyo No. 3 Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari	07/07/2023	050/17765		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	6.770.028,27	DAK 2023
44	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	120	Jln. Kuripan RT 1/ 1 Wonolopo Mijen				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	269.853,67	07.01.32.00 (Gedung Pustu Wonolopo)
45	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	150	Kaligetas RT 5/ 4 Jatibarang Mijen				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	244.259,43	07.01.32.00 (Gedung Pustu Jatibarang)
46	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Tidak	tidak beton	117	Jl. Taman Suryo Kusumo				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	400.317,79	07.01.23.02 (Pustu Muktiharjo Kidul)
47	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	tidak	tidak beton	105	Jl Kaliancar Podorejo				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	250.010,57	07.01.36.00 (Gedung Puskesmas pembantu Podorejo)
48	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	tidak	tidak beton	180	Jl Gondoriyo Raya				Tanah Milik Pemda	HIBAH	13.000,00	07.01.36.00 (Gedung Puskesmas Pembantu Bringin)
49	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	tidak	tidak beton	180	Jl Gondoriyo Raya				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	486.239,51	07.01.36.00 (Pemeliharaan Pustu Beringin)
50	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	tidak	tidak beton	105	Jl Kaliancar Podorejo				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	74.810,00	07.01.36.00 (Pemeliharaan Pustu PODOREJO)
51	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	Bertingkat	Beton	4000	Jl.Semarang Boja kel.Tambangan	02/03/2023	002		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	6.173.116,19	Gedung Puskesmas mijen droping dr distaru

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Bangunan Puskesmas Pembantu	Baik	Bertingkat	Beton	282	Jl. Gembongsari Dalam RT 01 RW 07					PEMBELIAN	899.698,32	07.01.16.03 (Gedung Puskesmas Pembantu Tambakrejo
53	Bangunan Puskesmas Pembantu	Baik	Tidak	Beton	942	SAWAH BESAR XIII	31/12/2023			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.084.782,45	PUSKESMAS PEMBANTU KALIGAWE
54	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Bertingkat	tidak beton	150	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	65.056,00	07.01.23.00 (Gedung pertemuan)
55	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Baik	Tidak	Beton	8.68	Jl.Semarang Boja Kel.Tambangan	02/03/2023	002		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	37.990,53	bangunan pos jaga droping dr distaru
56	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	Bertingkat	tidak beton	108	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	87.825,60	07.01.23.00 (Gedung dapur,garasi)
57	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	tidak	Beton	270.5	Jl.Layur RT 05 RW IV Dadapsari Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	400.552,37	07.01.04.00 (Gedung Puskesmas)
58	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	tidak	tidak beton	240	Jl. Raya Rowosari, Rowosari, Tembalang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.096.530,41	07.01.25.00 (GEDUNG PUSKESMAS)
59	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	110	Jl. Imam Soeparto, Bulusan, Tembalang				Tanah Milik Pemda	HIBAH	3.164.668,69	07.01.25.00 (GEDUNG PUSTU BULUSAN)
60	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	98	Jl.Cumi-cumi raya Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	45.000,00	07.01.04.01 (Gedung Puskesmas Pembantu)
61	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	180	Jl. Boom Lama Kuningan Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.362.132,17	07.01.04.02 (Gedung Puskesmas Pembantu)
62	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tingkat	tidak beton	225	Jl.Kenconowungu III/28				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.600.187,70	07.01.11.00 (Gedung/Bangunan Puskesmas)
63	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	tidak	tidak beton	480	Jl. Payung Asri, Pudakpayung, Banyumanik				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	721.444,56	07.01.29.00 (Gedung Puskesmas)
64	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	TDK	tidak beton	294	JL RM SOEBAGYONO TJONDRO KOESOEMA				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	336.345,00	07.01.33.00 (Gedung Rawat Inap)
65	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen Bangunan	Baik	tidak tingkat	tidak beton	320	jl Raden Patah 178 Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	793.959,47	07.01.08.00 (RAWAT JALAN)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	307	jl.srinindito IV Rt08 Rw01 simongan				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.554.623,46	07.01.15.00 (Gedung Kantor)
67	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	tidak	tidak beton	200	Jl.Abdulrahman saleh no.267				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	211.864,00	07.01.13.00 (Gedung RB, Lab Pertemuan)
68	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	375	Jl. Raya Walisongo KM.09				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.816.185,97	07.01.34.00 (Gedung Kantor Puskesmas)
69	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	TIDAK	Tidak	200	JLN.PATEMON-GUNUNG PATI				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	59.700,00	07.01.31.00 (Pemeliharaan Pustu Patemon)
70	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	260	Puskesmas Tlogosari Wetan				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.391.384,75	07.01.22.00 (Gedung Puskesmas Tlogosari Wetan)
71	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Bertingkat	BETON	678	JL. WOLTER MONGINSIDI RT 05/1				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.470.624,87	07.01.21.00 (GEDUNG PUSKESMAS BANGETAYU)
72	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	1304	Jl. Teuku Umar 271 Ngesrep Banyumanik				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.285.784,39	07.01.26.00 (Gedung Puskesmas Ngesrep)
73	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		Tidak	tidak beton	180	Jln. RM Hadi Soebeno no 146-148 Mijen Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	21.600,00	07.01.32.00 (Gedung Rontgen)
74	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Kurang Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	200	Puskesmas Kedungmundu				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.998.711,25	07.01.24.00 (Bangunan Kantor)
75	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	TIDAK	tidak beton	1400	JL. MERANTI RAYA 389				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.507.217,77	07.01.27.00 (Puskesmas)
76	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	404	Jl. Siliwangi no.572				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.327.479,83	07.01.35.00 (Gedung Puskesmas)
77	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Bertingkat	BETON	504.3	dr.wahidin no 22				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.908.547,35	07.01.17.00 (Gedung Puskesmas Candilama)
78	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	375	JL Genuksari				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	581.543,91	07.01.20.00 (Gedung Puskesmas)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	108	Jl. Laut Mangunharjo				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	363.314,47	07.01.37.00 (Bangunan pustu)
80	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	tidak bertingkat	tidak beton	346.5	Puskesmas Bulu Lor (Jl. Banowati Selatan II)				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.135.646,34	07.01.05.00 (Bangunan Puskesmas Bulu lor)
81	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	tidak bertingkat	tidak beton	104	Pustu Panggung (Jl. Brotojoyo)				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	589.108,65	07.01.05.00 (Gedung dan Bangunan)
82	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	516	Jl. Urip Sumoharjo KM 15				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	513.341,10	07.01.37.00 (Bangunan puskesmas mangkang)
83	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	100	JL sendang Indah Muktiharjo Lor				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	349.431,68	07.01.20.01 (Gedung Pustu Sendang Indah)
84	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	TDK BERTINGKAT	tidak beton	108.5	Jl. Ksatrian No 18				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	362.077,51	07.01.17.00 (Gedung Puskesmas Pembantu Jangli)
85	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	121	Jl. Siliwangi no.572				Tanah Milik Pemda	HIBAH	207.656,90	07.01.35.00 (Aula Gedung Puskesmas)
86	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	180	Pustu Sendangmulyo				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	398.458,64	07.01.24.04 (Bangunan Kantor)
87	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	TIDAK	tidak beton	105	JL.KARANGROTO RT 02 RW 07				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	756.791,57	07.01.21.01 (GEDUNG PUSKESMAS PEMBANTU KUDU)
88	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	100	Puskesmas Pembantu Pedurungan Kidul				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	101.412,40	07.01.22.00 (Gedung Pustu pedurungan Kidul)
89	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	tidak	tidak beton	150	Jl.Simongan				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	346.250,63	07.01.13.00 (Kantor Puskesmas Pembantu)
90	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	tidak tingkat	tidak beton	225	jl Raden Patah 178 Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	602.765,58	07.01.08.00 (RAWAT INAP)
91	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	TINGKAT	BETON	150	JL RM SOEBAGYONO TJONDRO KOESOEMA				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.497.968,58	07.01.33.00 (GEDUNG PUSKESMAS)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	tidak tingkat	tidak beton	207	jl Raden Patah 178 Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	604.061,00	07.01.08.00 (AULA)
93	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	tidak	tidak beton	141.8	Jl.Abdulrahman saleh no.267				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.282.524,59	07.01.13.00 (Gedung kantor Puskesmas)
94	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	320	Puskesmas Pembantu Kekancan Mukti				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	353.990,10	07.01.22.00 (Gedung Pustu Kekancan Mukti)
95	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	150	JL.KARANGROTO RT 02 RW 07				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	79.470,00	07.01.21.02 (GEDUNG PUSKESMAS PEMBANTU KARANGROTO)
96	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	150	Pustu Sendangguwo				Tanah Milik Pemda	HIBAH	180.153,98	07.01.24.01 (Bangunan Kantor)
97	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	462	Jl. Urip Sumoharjo KM 16				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.210.189,74	07.01.37.00 (Puskesmas Mangkang)
98	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	150	Pustu Mangunharjo				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	807.875,00	07.01.24.03 (Bangunan Kantor) BLUD
99	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Beton	176	Jl. Wolter Monginsidi Bangetayu Wetan	31/08/2023	B/1953/800/VIII/2023		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	169.419,70	07.01.22.00 (Gedung Pustu Plamongansari)
100	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	100	Puskesmas Pembantu Plamongansari				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	364.563,70	07.01.22.00 (Aula Puskesmas Tlogosari Wetan)
101	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	200	Puskesmas Tlogosari Wetan				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	46.500,00	07.01.24.02 (Bangunan Kantor)
102	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	150	Pustu Sambiroto				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	387.963,97	07.01.14.00 (Gedung PUSKESMAS)
103	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Kurang Baik	TIDAK BERTINGKAT	tidak beton	400	JL.Aribuana No.1 Krobokan Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.185.627,36	LANJUT BANGUNAN PUSKESMAS BARU
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	tidak	Beton	150	JL.MUSI RAYA NO 22				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.200.843,25	07.01.34.00 (Gudang Obat)
105	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	tidak beton	96	Jl. Raya Walisongo KM.09				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	105.223,00	07.01.34.00 (Aula)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	Tidak Bertingkat	tidak beton	622.8	Jl. Raya Walisongo KM.09				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	60.000,00	Paving
107	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	tidak	Beton	835	jl.meranti raya 306				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	105.674,00	paving droping dr distaru
108	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	Tidak	Beton	141.8	Jl.Semarang Boja Kel.Tambangan	27/02/2023	002		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	163.547,00	Lansekap/taman puskesmas droping dr distaru
109	Taman Semi Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	320	Jl.Semarang Boja Kel.Tambangan	02/03/2023	002		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	162.053,81	07.01.13.00 (Gedung kantor Puskesmas)
110	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak	Tidak	118	Jl. Arteri Soekarno Hatta	15/12/2023			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	381.985,02	BLUD = 196115076, LISTRIK = 14153166, DROPPING DKK = 171716782 (RUANG FARMASI)
111	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	TIDAK	tidak beton	150	JL.KI DALEM RT 04 RW 06 KUDU				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	192.198,80	07.01.21.00 (Rehab Gedung Pustu Karangroto)
112	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak	tidak beton	145	Jl. Raya Pongangan Kel. Pongangan				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	436.855,11	07.01.30.00 (Gedung Pustu Pongangan)
113	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Bertingkat	Beton	500	Jl imam bonjol no: 171				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.068.339,82	07.01.02.00 (BANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS PONCOL)
114	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Bertingkat	Beton	180	Jl. Kendeng Barat III/2, Sampangan				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.145.961,01	07.01.19.00 (Gedung Bangunan Puskesmas)
115	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Bertingkat	Beton	383.795	JLN.RAMBUTAN 44 SEKARAN				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.954.853,39	07.01.31.00 (Gedung Puskesmas Sekaran)
116	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	tidak	tidak beton	250	Jl.Abdulrahman saleh no.267				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	99.338,52	07.01.13.00 (REHAB.PUSKESMAS MANYARAN)
117	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Kurang Baik	Tidak	tidak beton	1199	Jl.Tirto Karanganyar No.29E, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu - Kota Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.924.925,19	07.01.38.00 (Gedung Puskesmas)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Bertingkat	Beton	742	Jl Slamet Riyadi 4 A				Tanah Milik Pemda	HIBAH	1.734.600,05	07.01.16.00 (Gedung Puskesmas Gayamsari)
119	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	TIDAK	Tidak	200	JLN.PATEMON-GUNUNG PATI				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	10.000,00	07.01.31.00 (Gedung Puskesmas Pembantu Patemon)
120	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak Bertingkat	tidak beton	180	Jl. Cikurai RT 4/3, Gajahmungkur				Tanah Milik Pemda	HIBAH	237.623,25	07.01.19.00 (Gedung Bangunan Pustu)
121	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak	tidak beton	200	Jl.Pemuda				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	227.093,37	07.01.02.01 (GEDUNG PUSKESMAS PEMBANTU BALAIKOTA)
122	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak	tidak beton	105	Desel Kel. Sadeng				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	498.295,15	07.01.30.00 (Gedung Pustu Sadeng)
123	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak	tidak beton	98	Jl. Mr Wuryanto Kel. Sumurejo Gunungpati				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	343.909,64	07.01.30.00 (Gedung Pustu Sumurrejo)
124	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak Bertingkat	tidak beton	100	Jl Badak V				Tanah Milik Pemda	HIBAH	395.482,55	07.01.16.01 (Gedung Puskesmas Pembantu Pandean lamper)
125	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak Bertingkat	tidak beton	180	Jl Sawah Besar XIII				Tanah Milik Pemda	HIBAH	66.300,00	07.01.16.00 (Rumah Dinas Kaligawe)
126	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak	tidak beton	114	Jl. Mr Wuryanto 38 Kel. Plalangan Gunungpati				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	392.823,00	07.01.30.00 (Gedung Rawat Inap)
127	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Bertingkat	Beton	380	Jl. Mr Wuryanto 38 Kel. Plalangan Gunungpati				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.529.823,86	07.01.30.00 (Gedung Puskesmas Induk)
128	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	110	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	89.452,00	07.01.23.00 (Rumah dinas tenaga medis)
129	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	100	Puskesmas Tlogosari Wetan				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	69.600,00	07.01.22.00 (Rumah Dinas Dokter`)
130	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Kurang Baik	tidak	tidak beton tidak beton	200	Jl rorojonggrang No.6				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	730.327,72	07.01.13.00 (Rumah Dinas)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	tidak	tidak beton	150	Lamper Tengah Gg XV				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	50.000,00	07.01.10.00 (Rumah Dinas Pegawai Paramedis)
132	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	200	Jl.Abdulrahman saleh no.265				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.669.298,13	07.01.13.00 (REHAB.RUMAH DINAS PUSKESMAS MANYARAN)
133	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	100	Puskesmas Tlogosari Wetan				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	151.553,00	07.01.22.00 (Rumah Dinas Bidan)
134	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	200	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	384.955,00	07.01.23.02 (Rumah dinas tenaga medis)
135	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	200	Jl. Satrio Mannah No.2				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	58.550,40	07.01.23.00 (Doorllop)
136	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Kurang Baik	TIDAK	tidak beton	100	Puskesmas Tlogosari Wetan				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	69.600,00	07.01.22.00 (Rumah Dinas Perawat)
137	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	96	Puskesmas Pembantu Kekancan Mukti				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	22.080,00	07.01.22.00 (Rumah Dinas Perawat)
138	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	100	Lamper Tengah Gg XV				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	708.337,96	07.01.10.00 (Rumah Dinas)
139	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	TIDAK	Tidak	200	JLN.PATEMON-GUNUNG PATI				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	40.320,00	07.01.31.00 (Rumah Dinas Puskesmas Sekaran)
140	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	150	JL Genuksari				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	20.000,00	07.01.20.00 (Rumah Dinas)
141	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	tidak bertingkat	tidak beton	200	Jl. Taman Lebdosari Rt 7 Rw 6				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	172.411,82	07.01.12.00 (Rumah Dinas Dokter)
142	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	200	JL Gebang anom Gebangsari				Tanah Milik Pemda	HIBAH	50.200,00	07.01.20.02 (Rumah Dinas)
143	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	tidak bertingkat	tidak beton	200	JLN.PATEMON-GUNUNG PATI				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	10.000,00	07.01.31.00 (Rumah Dinas Pustu patemon)
144	Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen		Tidak bertingkat	tidak beton	128	Jl. Taman Lebdosari Rt 7 Rw 6				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	107.520,00	07.01.12.00 (Rumah Dinas Bidan dan Perawat)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	200	Puskesmas Kedungmundu				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	120.000,00	07.01.24.00 (Bangunan Rumah Dinas Perawat)
146	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Kurang Baik	Tidak bertingkat	tidak beton	200	Puskesmas Kedungmundu				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	197.838,70	07.01.24.00 (Rumah negara golongan II type D permanen)
147	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Baik	Tidak	tidak beton	100	Jl. Raya Walisongo KM.09				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	344.834,61	07.01.34.00 (Rumah Dinas Bidan)
148	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Kurang Baik	Tidak	tidak beton	108	Jl. Irigasi Mangkang kulon.				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	484.309,31	07.01.37.00 (Rumdin dokter)
149	Rumah Negara Gol II Lain-lain		Tidak	tidak beton	108	Jl. Irigasi Mangkang kulon				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	235.289,48	07.01.37.00 (Rumdin bidan
150	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	150	Jl Gondoriyo Raya				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	21.900,00	07.01.36.00 (Rumah Dinas Pustu Gondoriyo)
151	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Kurang Baik	TIDAK bertingkat	Tidak beton	200	Puskesmas Kedungmundu				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	525.588,91	07.01.24.00 (Bangunan Rumah Dinas Dokter)
152	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	TIDAK	tidak beton	200	JL.KARANGROTO RT 02 RW 07				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	30.000,00	07.01.21.01 (RUMAH DINAS)
153	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	150	Jl Kaliancar Podorejo				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	13.000,00	07.01.36.00 (Rumah Dinas Pustu Podorejo)
154	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	Baik	tidak	tidak beton	150	JL.WOLTER MONGINSIDI RT 05/1				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	112.389,00	07.01.21.00 (RUMAH DINAS)
155	Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen	Kurang Baik	Tidak	tidak beton	200	JL RM SOEBAGYONO TJONDRO KOESOEMA				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	224.351,85	07.01.33.00 (Rumah Dinas)
156	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	tidak	tidak beton	98	Jl. Raya Walisongo KM.09				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	87.465,00	07.01.34.00 (Rumah Dinas Dokter)
157	Asrama Permanen	Baik	tidak	tidak beton	357	JL. MERANTI RAYA 307				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	235.275,70	07.01.27.00 (Rumah dinas dokter)
158	Asrama Permanen	Baik	TIDAK	tidak beton	255	JL. MERANTI RAYA 305				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	22.962,62	07.01.27.00 (Rumah dinas bidan)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan RP)	Keterangan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	Pagar Permanen	Baik	Tidak	tidak beton	325	Jln. RM Hadi Soebeno no 146-148 Mijen Semarang				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	94.470,00	07.01.32.00 (Pagar Bumi Puskesmas)
160	Pagar Permanen	Baik	TIDAK	tidak beton	1920	JLN.PATEMON-GUNUNG PATI				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	5.000,00	07.01.31.00 (Pagar BRC)
161	Pagar Permane	Baik	Tidak	Tidak	150	Jl Laut Mangunharjo				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	54.500,00	07.01.37.00 (Rehab Pustu)
162	Pagar Permanen	Baik	Tidak	Beton		Jl Laut Mangunharjo	27/11/2020			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	204.865,83	Pagar Pustu Mangunharjo
163	Pagar Permanen	Baik	tidak	tidak	135	jln RM Hadi Soebeno 5 Tambangan Mijen Semarang		B/3894.A/900/XI /2023		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	104.000,00	BLUD 2023
164	Pagar Permanen	Baik	bertingkat	beton	36.6	Jl.Semarang Boja Kel.Tambangan	02/03/2023	002		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	62.430,38	pagar depan droping dr distaru
												134.386.364,39	

Aset Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebagian besar aset berupa bangunan gedung kantor permanen dan bangunan klinik atau puskesmas. Aset-aset ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di Jl. Pandanaran 79, Wismasari Ngaliyan, dan berbagai puskesmas di seluruh kota Semarang. Secara keseluruhan, kondisi bangunan mayoritas berada dalam kondisi Baik, meskipun ada beberapa Rumah Negara yang tercatat dalam kondisi Rusak Berat dan beberapa bangunan dalam kondisi Kurang Baik. Luas lantai bangunan bervariasi dari 80 m^2 hingga 3300 m^2, menunjukkan skala operasional yang beragam. Seluruh aset ini berdiri di atas Tanah Milik Pemda dan diperoleh melalui proses Pembelian dan beberapa melalui Hibah, dengan harga yang berbeda-beda, menunjukkan nilai yang beragam sesuai dengan jenis dan kondisinya serta mengikuti NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di tahun pengadaan.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang

Tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang dibagi berdasarkan bidang urusan yang mencakup capaian kinerja pada urusan kesehatan. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio			
		2022	2023	2024	2025	2026	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Rasio
TUJUAN RENSTRA										
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	77.38 tahun	77.40 tahun	77.42 tahun	77.44 tahun	77.46 tahun	77.69	77.90 tahun	78,24 tahun	100.39
SASARAN RENSTRA										
Meningkatkan upaya kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*) dan bermutu	Angka Kematian Bayi	6.08 per 1000 KH	6.07 per 1000 KH	6.06 per 1000 KH	6.05 per 1000 KH	6.04 per 1000 KH	5.60 per 1000 KH	7,09 per 1000 KH	7,99 per 1000 KH	131,85
Meningkatkan upaya kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*) dan bermutu	Angka Kematian Ibu	71.34 per 100.000 KH	71.33 per 100.000 KH	71.32 per 100.000 KH	71.31 per 100.000 KH	71.30 per 100.000 KH	67.25 per 100.000 KH	79,85 per 100.000 KH	80,44 per 100.000 KH	97.58

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio			
		2022	2023	2024	2025	2026	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Rasio
Meningkatkan upaya kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*) dan bermutu	Angka mobiditas	12.71 per 1000 penduduk	12.70 per 1000 penduduk	12.69 per 1000 penduduk	12.68 per 1000 penduduk	12.67 per 1000 penduduk	11.01 per 1000 penduduk	12.69 per 1000 penduduk	12.69 per 1000 penduduk	100
Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	1.34 per 1000 penduduk	1.37 per 1000 penduduk	1.40 per 1000 penduduk	1.43 per 1000 penduduk	1.43 per 1000 penduduk	2.60 per 1000 penduduk	1,36 per 1000 penduduk	7.57 per 1000 penduduk	163.42
Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	46.33%	48.59%	49.72%	50.85%	51.98%	56.5%	66.10%	66.67%	134,09
Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan	Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar	30%	40%	50%	60%	70%	100%	43.53%	50%	100
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	72.40 Nilai	72.45 Nilai	72.50 Nilai	72.55 Nilai	72.60 Nilai	74.01	78.65	79.70	109,93

Kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RS	Indek	73,50	96,50	97,00	97,50	95,90	96,98	97,35	97,50	130,47	100,49	100,36	100
2.	Nilai Kinerja BLUD Baik	Indek	83	83,50	84,00	84,50	73,20	87,50	86,37	83,79	88,19	104,79	102,82	99,159
3.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Type B Pendidikan	Persen	100	100	100	100	98,39	92,37	93,36	94,24	98,39	92,37	93,36	94,24

2.1.4. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Kesehatan.

a. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Dinas Kesehatan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Semarang Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Targte Indiaktor Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	persen			0,36	0,37	0,38	0,39	0,4	0,32	0,34	0,35			89%	89%	93%		
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	persen			90	90,6	93,7	96,8	100	81,25	93,9	100			90,27%	103,6%	106,7%		
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Targte Indiaktor Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)				100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup			71,34	71,33	71,32	71,31	71,3	67,25	79,8	79,8			94%	112%	112%		
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup			6,08	6,07	6,06	6,05	6,04	5,6	7,08	7,08			92%	117%	117%		
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup			7	6,9	6,88	6,86	6,84	6,5					93%	0%	0%		

Tabel 2.8 Pencapaian Efektivitas Kinerja Pelayanan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	*Net Death Rate* (NDR)	Permill (‰)	48,71	24,1	26,32	28,51
2	*Bed Occupancy Rate* (BOR)	Persen (%)	50,8	62,74	72,34	72,28
3	*Length of Stay* (LOS)	Hari	5,96	5,26	4,84	5,3
4	*Bed Turn Over* (BTO)	Persen (%)	37,37	50,9	63,91	61,67
5	*Turn Over Internal* (TOI)	Hari	5	3,07	1,58	1,75

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Lampiran Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2022 – 2026, Salah satu tren yang paling menonjol adalah dalam realisasi pencapaian target SPM yang mencakup layanan kesehatan dasar seperti kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, balita, serta kelompok usia tertentu (usia pendidikan dasar, usia produktif, dan lansia). Semua indikator ini menunjukkan realisasi kinerja yang masuk dalam kategori "Sangat Tinggi" (91%-100%), yang menandakan bahwa Kota Semarang telah berhasil menjaga standar pelayanan kesehatan yang optimal secara berkelanjutan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan di Kota Semarang telah cukup kuat dalam memberikan layanan dasar, baik dalam aspek ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, maupun mekanisme pelayanan yang efektif. Selain itu, tren ini juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mempertahankan standar kualitas layanan kesehatan yang merata bagi semua kelompok usia dan kondisi kesehatan

Selain keberhasilan dalam SPM, layanan kesehatan terkait Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes mellitus juga menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Namun, meskipun indikator PTM telah mencapai target, tantangan terbesar dalam aspek ini bukan sekadar pencapaian angka, melainkan bagaimana mengendalikan pertumbuhan jumlah penderita PTM di masa depan. Dengan semakin meningkatnya risiko penyakit seperti diabetes dan hipertensi akibat gaya hidup modern, Kota Semarang perlu memastikan program pencegahan dan edukasi kesehatan tetap berjalan efektif untuk menekan angka kejadian PTM, bukan sekadar memastikan layanan pengobatan tersedia.

Pada tahun 2022, indikator Angka kematian ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita menunjukkan realisasi yang lebih kecil dari target yang artinya pencapaian yang positif, karena semakin rendah angka-angka tersebut maka semakin baik kinerja dalam menurunkan angka kematian. Hal ini mencerminkan efektivitas dari program-program yang dijalankan dan merupakan dasar yang baik untuk melanjutkan dan meningkatkan pencapaian pada tahun-tahun berikutnya. Dengan pencapaian yang baik ini, penting untuk terus mempertahankan dan memperkuat upaya yang telah ada, dengan fokus pada peningkatan kualitas

layanan kesehatan, distribusi yang lebih merata, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat terus mengurangi angka kematian di masa depan.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Semarang

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kota Semarang

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
DINAS KESEHATAN	590.502.827.055	416.418.283.645	464.949.963.557	438.408.533.089	449.930.330.927	546.270.403.687	399.185.919.232	449.495.114.334	421.919.134.182		92,51 %	95,86 %	96,68 %				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	279.215.732.634	155.221.697.458	150.207.393.484	169.107.640.954	165.123.716.343	252.584.440.545	149.555.654.563	142.068.767.634	155.443.456.882		90,46 %	96,35 %	94,58 %	91,9 2%			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.219.497.891	42.875.987.035	45.580.931.033	36.607.489.649	58.863.117.149	26.209.124.310	40.029.936.872	41.983.971.060	34.109.164.045		78,90 %	93,36 %	92,11 %	93,1 8%			
Pembangunan Puskesmas	6.396.116.525	5.189.635.325		13.872.836.644	20.916.000.000	1.020.075.149	4.818.603.434		11.547.770.462		15,95 %	92,85 %		83,2 4%			
Pengembangan Puskesmas			12.310.081.194,0 0	9.976.411.505				9.976.411.505	10.854.462.939				81,04 %	108, 80%			
Pengembangan Rumah Sakit			2.314.612.226,00	2.742.100.000				2.167.104.537	2.550.648.773				93,63 %	93,0 2%			
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.918.316.000	125.225.950				3.802.388.850	117.469.950				97,04 %	93,81 %					
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	266.728.460		2.729.350.000	740.950.000	1.325.000.000	254.456.000			672.272.560		95,40 %		0,00 %	90,7 3%			
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	958.213.602	2.599.983.921	4.900.024.490			196.935.000	2.438.449.960				20,55 %	93,79 %	0,00 %				
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.943.248.551	51.762.700	1.467.966.690			2.877.534.535	51.762.700				97,77 %	100,0 0%	0,00 %				

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.094.085.658	18.531.108.787	9.947.345.321	6.383.848.563	30.659.611.324	4.051.785.678	16.631.670.824		5.763.734.876		98,97 %	89,75 %	0,00 %	90,29%			
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				398.419.000					366.383.000					91,96%			
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.492.923.937	5.962.505.825				2.353.891.435					94,42%			
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	99.053.000					94.608.800					95,51 %						
Pengadaan Obat, Vaksin	5.808.177.251	7.773.892.755	6.952.459.112			5.375.332.028	7.770.333.937	6.935.353.046			92,55 %	99,95 %	99,75 %				
Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.735.558.844	8.604.377.597	4.959.092.000			8.535.971.462	8.201.646.067	4.760.988.840			97,72 %	95,32 %	96,01 %				
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.350.376.208	101.300.953.322	94.923.664.091	120.842.558.030	102.526.180.990	217.910.212.443	98.733.572.276	90.928.857.289	113.112.620.612		91,81 %	97,47 %	95,79 %	93,60%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.468.039.827	1.192.047.560	69.372.500	955.159.987	76.700.000	2.466.552.679	1.188.749.704	69.199.850	953.255.400		99,94 %	99,72 %	99,75 %	99,80%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.123.817.579	475.067.520	93.951.520	22.750.000	40.300.000	725.043.358	445.840.220	93.901.525	20.450.000		64,52 %	93,85 %	99,95 %	89,89%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	56.740.000	149.634.000	93.212.750	707.899.420	23.600.000	56.740.000	148.545.000	93.035.000	398.320.400		100,00%	99,27 %	99,81 %	56,27%			

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	579.475.250	783.197.460	46.237.500	253.564.000	10.750.000	579.475.250	782.847.960	46.009.000	250.000.000		100,00%	99,96%	99,51%	98,59%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	486.460.090	421.902.980	137.556.885	54.006.180	72.576.950	486.033.970	412.457.930	135.727.800	52.099.700		99,91%	97,76%	98,67%	96,47%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.500.000	222.341.200	74.906.892	99.500.000	207.658.560	4.500.000	220.834.772	68.344.149	95.288.400		100,00%	99,32%	91,24%	95,77%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	169.423.119	116.655.300	31.063.177	970.474.000	31.000.000	169.202.400	114.722.560	30.723.625	819.262.754		99,87%	98,34%	98,91%	84,42%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.113.500	123.871.200	58.925.918	50.000.000	17.134.157	15.250.000	122.364.772	58.471.000	49.980.900		94,64%	98,78%	99,23%	99,96%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.309.500	120.007.200	1.887.629.333	3.272.563.100	17.134.157	5.700.000	118.510.772	1.343.170.000	2.370.868.350		77,98%	98,75%	71,16%	72,45%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.365.000	193.662.100	48.646.863	52.500.000	11.145.701	17.645.000	192.164.072	48.575.400	50.549.500		96,08%	99,23%	99,85%	96,28%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	106.953.500	977.528.208	2.794.277.144	9.837.193.269	208.401.279	106.953.500	909.343.513	2.785.532.713	9.731.488.509		100,00%	93,02%	99,69%	98,93%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	69.953.500	866.229.090	809.873.712	962.145.003	105.412.300	67.253.500	810.440.117	726.427.578	866.839.962		96,14%	93,56%	89,70%	90,09%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7.706.552.600	2.419.765.700	12.330.000	44.151.145		6.857.635.800	2.400.321.246	12.329.975	41.443.635		88,98%	99,20%	100,00%	93,87%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	31.980.164.479	8.047.459.445	30.520.000			17.834.490.268	7.729.314.909	30.505.500			55,77%	96,05%	99,95%				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.428.493.203	5.352.647.940	19.176.915.033	9.269.512.455	2.828.550.928	2.254.917.019	5.326.990.136	16.619.853.340	8.241.747.991		92,85%	99,52%	86,67%	88,91%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	194.967.100	404.263.960	77.414.100	48.318.180	19.200.000	194.272.100	403.491.670	77.388.180	48.179.000		99,64%	99,81%	99,97%	99,71%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	680.649.857	602.330.070	322.209.190	1.450.827.415	214.078.770	657.287.438	602.123.400	290.443.825	1.441.503.510		96,57%	99,97%	90,14%	99,36%			

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	624.573.435	412.213.690	188.038.907	625.787.080	182.503.410	605.451.923	354.337.940	185.043.725	610.622.500		96,94 %	85,96 %	98,41 %	97,58%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	21.125.000	7.987.270	22.275.000	33.875.000	89.850.000	19.325.000	7.892.270	18.675.000	33.826.300		91,48 %	98,81 %	83,84 %	99,86%			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.116.644.020	397.244.540	193.323.746	432.150.000	188.697.674	1.567.335.800	397.211.230	193.323.375	401.645.000		74,05 %	99,99 %	100,00%	92,94%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			107.747.120					107.747.120					100,00%				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	36.031.100	16.795.000	25.490.745	106.218.080	17.053.431	36.031.100	16.745.000	25.464.200	105.298.000		100,00%	99,70 %	99,90 %	99,13%			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.962.559.518	3.687.623.970	1.689.522.748	7.742.990.207	1.047.119.315	2.794.439.198	3.645.743.016	1.631.310.465	6.925.349.641		94,33 %	98,86 %	96,55 %	89,44%			
Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat	167.706.531.601	57.857.680.933	64.178.066.703	73.023.969.680	46.301.295.300	167.670.770.719	57.750.836.936	63.698.917.393	72.590.286.267		99,98 %	99,82 %	99,25 %	99,41%			
Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional				1.600.000					1.600.000					100,00%			
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.185.416.091	6.086.834.986	955.847.446	110.000.000	31.084.824.340	734.104.000	5.622.698.576	908.555.690	110.000.000		61,93 %	92,37 %	95,05 %	100,00%			
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.056.020.000					1.891.122.000					91,98 %					
Operasional Pelayanan Puskesmas	192.630.920	220.540.800				192.597.740	220.540.800				99,98 %	100,00%					
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.592.044.909	7.145.719.359	525.270.744	9.460.549.379	12.696.537.241	3.780.935.162	6.173.210.465	452.909.600	5.698.376.258		82,34 %	86,39 %	86,22 %	60,23%			

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Laboratorium Kesehatan)	1.109.618.721					1.038.935.040					93,63 %						
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Instalasi Farmasi)	1.129.326.200					1.074.892.269					95,18 %						
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	5.133.275.166	74.460.000	704.762.000	253.240.000	32.000.000	3.599.556.037	74.460.000	661.995.511	243.758.435		70,12 %	100,00%	93,93 %	96,26%			
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.940.000	114.115.000	8.512.500	19.275.000	18.650.000	3.420.000	13.450.000	8.467.600	17.475.000		69,23 %	11,79 %	99,47 %	90,66%			
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	16.340.000	64.210.000	192.024.664	69.371.071	42.275.000	16.340.000	64.210.000	188.726.700	62.998.900		100,00%	100,00%	98,28 %	90,81%			
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.421.341.423	690.896.841	256.210.310	198.863.150	5.9555,461.845	2.277.126.173	572.051.290	212.198.500	187.399.300		94,04 %	82,80 %	82,82 %	94,24%			
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			42.757.941	73.370.329	46.429.000			40.956.500	70.470.200				95,79 %	96,05%			
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			39.487.500	67.340.000	78.291.321			35.887.200	60.989.900				90,88 %	90,57%			
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			29.283.500	75.545.000	31.843.000			29.040.250	72.044.900				99,17 %	95,37%			
Pengelolaan Upaya kesehatan Ibu Dan Anak				497.849.900	100.008.508				489.202.000					98,26%			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.203.155.251	1.415.958.793	2.597.222.190	1.536.149.870	2.139.599.420	1.120.994.300	1.371.553.278	2.511.639.570	1.478.668.540		93,17 %	96,86 %	96,70 %	96,26%			
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	109.637.543	175.451.556	900.513.380			90.723.340	171.859.190	884.946.575			82,75 %	97,95 %	98,27 %				
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.003.900.600	1.097.981.260	900.513.380	1.536.149.870	2.139.599.420	963.858.160	1.068.408.628	884.946.575	1.478.668.540		96,01 %	97,31 %	98,27 %	96,26%			

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	89.617.108	142.525.977	796.195.430			66.412.800	131.285.460	741.746.420			74,11 %	92,11 %	93,16 %				
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.442.703.284	9.628.798.308	7.455.818.374	8.209.554.910	1.594.818.784	7.300.560.300	9.420.592.137	7.019.482.790	6.743.003.685		98,09 %	97,84 %	94,15 %	82,14%			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.330.000	44.676.860	9.900.000	19.900.000	20.000.000	9.330.000	38.450.000	9.700.000	17.950.000		100,00%	86,06 %	97,98 %	90,20%			
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	571.099.000	4.059.070.690	4.650.918.374	1.053.310.922	959.017.831	501.403.500	3.945.156.593	4.251.774.416	995.367.798		87,80 %	97,19 %	91,42 %	94,50%			
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.862.274.284	5.525.050.758	2.795.000.000	7.136.343.988	221.997.185	6.789.826.800	5.436.985.544	2.758.008.374	5.729.685.887		98,94 %	98,41 %	98,68 %	80,29%			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	79.496.125.964	13.616.058.096	2.970.396.266	9.357.706.200	1.163.849.040	73.993.151.098	12.989.187.564	2.892.756.020	8.871.465.590		93,08 %	95,40 %	97,39 %	94,80%			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	39.151.163.835	6.688.979.048	455.983.803	472.147.328	265.306.748	36.743.770.540	6.385.793.782	448.694.814	463.215.932		93,85 %	95,47 %	98,40 %	98,11%			
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	180.684.238	171.496.328	17.925.000	18.305.000	22.381.000	158.183.602	164.182.797	17.850.000	18.305.000		87,55 %	95,74 %	99,58 %	100,00%			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	38.940.806.871	6.475.611.600	59.671.200	67.405.228	80.657.748	36.555.952.446	6.179.743.138	57.390.111	67.146.105		93,88 %	95,43 %	96,18 %	99,62%			
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29.672.726	41.871.120	378.387.603	386.437.100	162.268.000	29.634.492	41.867.847	373.454.703	377.764.827		99,87 %	99,99 %	98,70 %	97,76%			

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	596.899.147	119.050.000	1.029.214.330	4.206.705.772	316.617.772	252.805.009	108.800.000	997.683.196	3.972.516.863		42,35 %	91,39 %	96,94 %	94,4 3%			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	596.899.147	119.050.000	1.029.214.330	4.206.705.772	316.617.772	252.805.009	108.800.000	997.683.196	3.972.516.863		42,35 %	91,39 %	96,94 %	94,4 3%			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	835.515.050	734.926.424	957.701.462	1.225.416.108	287.000.000	596.491.396	703.352.208	923.174.030	1.191.303.000		71,39 %	95,70 %	96,39 %	97,2 2%			
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	140.725.582	116.640.720	219.373.405	129.580.610	97.476.370	98.646.198	109.329.004	215.410.575	123.403.000		70,10 %	93,73 %	98,19 %	95,2 3%			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.201.380	116.640.720	219.373.405	129.580.610	97.476.370	92.021.198	109.329.004	215.410.575	123.403.000		76,56 %	93,73 %	98,19 %	95,2 3%			
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.524.202					6.625.000					32,28 %						
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	123.881.943	138.762.688	129.738.663	273.192.490	125.134.880	99.979.500	134.101.000	123.088.220	267.776.900		80,71 %	96,64 %	94,87 %	98,0 2%			

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	123.881.943	138.762.688	129.738.663	273.192.490	125.134.880	99.979.500	134.101.000	123.088.220	267.776.900		80,71 %	96,64 %	94,87 %	98,02%			
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	153.150.000	112.059.804	129.738.663	209.934.954	64.388.750	99.620.000	108.246.100	123.088.220	204.471.600		65,05 %	96,60 %	94,87 %	97,40%			
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	153.150.000	112.059.804	129.738.663	209.934.954	64.388.750	99.620.000	108.246.100	123.088.220	204.471.600		65,05 %	96,60 %	94,87 %	97,40%			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.333.594.206	3.352.260.616	1.776.825.130	670.148.242	656.000.000	1.299.750.972	3.327.942.340	1.725.718.750	658.183.480		97,46 %	99,27 %	97,12 %	98,21%			
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.509.654	1.468.491.348	125.679.680	111.240.121	162.000.000	159.596.000	1.458.210.500	121.095.275	110.455.500		90,42 %	99,30 %	96,35 %	99,29%			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	176.509.654	1.468.491.348	125.679.680	111.240.121	162.000.000	159.596.000	1.458.210.500	121.095.275	110.455.500		90,42 %	99,30 %	96,35 %	99,29%			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	490.287.449	207.638.960	762.732.885	223.834.000	166.000.000	490.279.486	205.760.670	741.764.100	218.636.240		100,00%	99,10 %	97,25 %	97,68%			

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	490.287.449	207.638.960	762.732.885	223.834.000	166.000.000	490.279.486	205.760.670	741.764.100	218.636.240		100,00%	99,10%	97,25%	97,68%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	270.454.476.811	252.344.963.619	211.253.140.771	261.192.513.059	281.109.690.064	254.805.703.622	241.120.023.613	205.948.283.146	258.750.488.420		94,21%	95,55%	97,49%	99,07%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.951.055	85.500.670	39.396.080	102.602.150	131.685.200	12.086.000	78.708.950	38.487.325	95.847.511		20,50%	92,06%	97,69%	93,42%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.382.455	16.443.760	6.108.800	47.718.592	51.078.400	866.000	15.029.000	5.549.200	44.177.047		62,64%	91,40%	90,84%	92,58%			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.484.745	14.854.150	8.188.500	7.536.000	7.468.800	1.500.000	12.975.000	8.188.500	7.532.700		27,35%	87,35%	100,00%	99,96%			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.187.418	14.920.420	8.734.400	8.976.000	8.908.800	2.588.000	14.602.200	8.651.150	8.972.400		49,89%	97,87%	99,05%	99,96%			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.225.382	9.603.660	2.940.820	5.504.000	3.501.600	3.273.000	8.932.000	2.689.575	5.481.400		17,96%	93,01%	91,46%	99,59%			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.225.382	10.662.840	3.486.720	2.992.000	2.969.600	2.359.000	10.293.500	3.473.175	2.988.300		12,94%	96,54%	99,61%	99,88%			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.445.673	19.015.840	9.936.840	29.875.558	7.758.000	1.500.000	16.877.250	9.935.725	26.695.664		14,36%	88,75%	99,99%	89,36%			
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					50.000.000												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	192.103.198.356	170.757.858.767	197.569.728.850	242.149.562.400	269.673.483.480	184.481.911.441	166.697.224.737	193.927.351.351	241.752.876.782		96,03%	97,62%	98,16%	99,84%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	191.491.237.956	170.077.502.567	197.020.852.850	241.584.296.000	268.926.337.080	183.944.431.441	166.088.793.450	193.400.044.711	241.187.610.382		96,06%	97,65%	98,16%	99,84%			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	603.600.000	671.160.000	538.760.000	554.120.000	731.688.000	534.680.000	599.910.000	517.191.000	554.120.000		88,58%	89,38%	96,00%	100,00%			

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.786.800	3.065.400	3.372.000	3.678.000	5.040.400		2.731.387	3.372.000	3.678.000		0,00	89,10 %	100,00%	100, 00%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2.786.800	3.065.400	3.372.000	3.678.000	5.152.800	2.300.000	2.909.900	3.371.640	3.678.000		82,53 %	94,93 %	99,99 %	100, 00%			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.786.800	3.065.400	3.372.000	3.790.400	5.265.200	500.000	2.880.000	3.372.000	3.790.400		17,94 %	93,95 %	100,00%	100, 00%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.519.128.151	2.368.622.617	3.948.579.183	3.383.091.497	2.308.875.975	584.422.040	1.161.983.416	3.352.754.286	3.113.664.030		38,47 %	49,06 %	84,91 %	92,04%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.877.172	29.024.948	23.091.000	52.209.800	81.803.000	12.181.000	19.986.000	23.009.500	51.495.398		48,96 %	68,86 %	99,65 %	98,63%			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.161.029	12.517.960	93.456.770	81.964.530	22.031.340	49.376.296	10.615.750	92.652.033	78.271.022		87,92 %	84,80 %	99,14 %	95,49%			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	343.540.000	383.195.200	196.736.940	179.665.390	96.781.579	182.629.796	278.302.700	144.482.015	159.948.315		53,16 %	72,63 %	73,44 %	89,03%			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.840.000	3.840.000	1.689.000	1.935.000	3.444.730	3.839.500		56,30 %	58,64 %	94,90 %	99,99%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	854.315.000	1.259.522.740	1.128.720.363	938.422.693	1.208.792.740	120.176.948	582.127.966	809.696.008	784.277.795		14,07 %	46,22 %	71,74 %	83,57%			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	237.234.950	681.061.769	2.502.944.110	2.126.989.084	895.627.316	218.369.000	269.016.000	2.279.470.000	2.035.832.000		92,05 %	39,50 %	91,07 %	95,71%			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.521.822	367.822.421	2.452.738.840	8.533.148.199	984.660.947	236.575.000	317.224.000	2.396.466.026	7.291.139.300		84,33 %	86,24 %	97,71 %	85,44%			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.521.822	367.822.421	2.452.738.840	8.533.148.199	984.660.947	236.575.000	317.224.000	2.396.466.026	7.291.139.300		84,33 %	86,24 %	97,71 %	85,44%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.884.689.976	1.946.145.914	3.134.564.194	2.953.322.880	3.071.729.541	1.493.540.784	1.572.263.040	2.612.580.075	2.643.050.477		79,25 %	80,79 %	83,35 %	89,49%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	1.000.000			1.000.000	1.095.000					10,95 %	0,00					

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	674.264.976	720.607.914	795.574.384	1.062.200.000	1.149.294.501	508.192.463	577.523.078	649.435.112	905.794.651		75,37 %	80,14 %	81,63 %	85,28%			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.750.000										0,00 %						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.162.675.000	1.224.538.000	2.338.989.810	1.891.122.880	1.921.435.040	984.253.321	994.739.962	1.963.144.963	1.737.255.826		84,65 %	81,23 %	83,93 %	91,86%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.681.383.600	3.926.153.850	4.108.133.624	4.070.785.933	4.939.254.921	2.486.540.249	3.241.158.613	3.620.644.083	3.853.910.320		67,54 %	82,55 %	88,13 %	94,67%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.350.000	194.863.630	226.572.720	192.915.000	211.765.763	50.976.910	165.501.639	218.946.731	150.450.979		23,78 %	84,93 %	96,63 %	77,99%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.337.830.000	1.967.922.270	2.038.703.580	1.878.627.000	2.392.552.008	1.516.740.547	1.649.267.621	1.927.678.645	1.852.389.999		64,88 %	83,81 %	94,55 %	98,60%			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.128.600	700.822.060	740.912.200	530.050.130	464.359.350	148.966.094	443.160.592	421.553.892	474.477.246		66,76 %	63,23 %	56,90 %	89,52%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	830.425.000	953.410.890	1.018.730.124	1.423.212.203	1.817.000.000	753.681.000	931.502.561	1.018.078.865	1.336.013.896		90,76 %	97,70 %	99,94 %	93,87%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.650.000	109.135.000	83.215.000	45.981.600	53.577.800	16.175.698	51.726.200	34.385.950	40.578.200		21,38 %	47,40 %	41,32 %	88,25%			
Peningkatan Pelayanan BLUD	70.926.603.851	72.892.859.380	78.813.108.873		82.880.221.812	65.694.224.579	68.051.460.857	77.059.960.470		298.301.023	92,62 %	93,36 %	97,78 %	107,78%	0,36 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PONCOL)	1.500.000.000	1.795.238.276	1.930.267.112	1.841.164.000	1.832.150.000	1.430.932.913	1.574.404.920	1.897.718.158	1.984.480.194	35.664.771	95,40 %	87,70 %	98,31 %	116,26%	1,95 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIROTO)	1.342.172.038	1.278.220.565	1.450.439.363	1.400.335.000	1.393.479.000	7.931.882	0,57%	1.438.023.108	1.627.973.167	7.931.882	0,59 %	0,00 %	99,14 %	108,13%	0,57 %		

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANDARHARJO)	2.336.176.000	2.564.180.980	2.588.416.355	2.695.151.900	2.681.957.000	2.189.401.450	2.210.571.357	2.577.646.878	2.914.141.159	9.139.554	93,72 %	86,21 %	99,58 %	102, 60%	0,34 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BULU LOR)	1.828.618.560	1.905.819.478	1.947.591.815	2.030.358.600	2.020.418.000	1.709.020.482	1.864.886.708	1.937.913.840	2.083.205.824	0	93,46 %	97,85 %	99,50 %	122, 62%	0,00 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS HALMAHERA)	1.887.500.000	2.047.061.685	2.114.958.476	2.286.117.000	2.274.924.000	1.772.688.524	1.869.206.558	2.088.935.966	2.803.253.777	1.291.300	93,92 %	91,31 %	98,77 %	106, 71%	0,06 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BUGANGAN)	1.025.512.593	1.108.769.478	1.498.556.021	1.531.976.700	1.524.477.000	1.005.986.792	1.105.466.508	1.457.860.547	1.634.761.162	0	0,00 %	0	0,00 %	103, 58%	0,00 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGDORO)	2.116.500.000	2.200.000.000	2.860.352.499	2.766.188.600	2.752.646.000	2.108.854.630	2.178.465.380	2.841.186.372	2.865.213.801	9.001.350	99,64 %	99,02 %	99,33 %	107, 19%	0,33 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PANDANARAN)	2.104.822.142	1.958.363.655	2.084.996.482	2.449.360.000	2.437.368.000	2.064.371.687	1.881.288.097	2.075.498.936	2.625.482.892	6.847.556	98,08 %	96,06 %	99,54 %	107, 03%	0,28 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LAMPER TENGAH)	1.512.027.896	1.282.905.855	1.425.259.523	1.590.561.600	1.582.775.000	1.461.235.341	1.242.733.707	1.420.544.731	1.702.385.678	10.548.135	96,64 %	96,87 %	99,67 %	108, 82%	0,67 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGAYU)	1.215.697.348	1.320.205.433	1.300.803.479	1.358.000.000	1.351.352.000	7.930.276	0,58%	1.251.717.250	1.477.760.711	1.200.000	0,65 %	0,00 %	96,23 %	103, 77%	0,09 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LEBDOSARI)	1.484.012.174	1.431.196.263	1.578.346.514	1.770.196.400	1.761.530.000	1.441.100.005	1.408.714.757	1.517.561.997	1.836.987.472	4.903.857	97,11 %	98,43 %	96,15 %	110, 43%	0,28 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANYARAN)	1.399.805.685	1.410.613.941	1.628.424.096	1.775.000.000	1.766.310.000	0	0,00%	1.615.369.004	1.960.189.317	0	0,00 %	0	0,00 %	101, 06%	0,00 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KROBOKAN)	1.358.427.756	1.309.325.953	1.367.002.993	1.528.885.500	1.521.400.000	1.238.230.178	1.225.033.584	1.355.982.771	1.545.073.595	1.401.830	91,15 %	93,56 %	99,19 %	122, 43%	0,09 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN)	1.095.214.642	1.197.703.071	1.358.434.176	1.275.747.200	1.269.502.000	1.084.571.181	1.195.350.971	1.358.291.423	1.561.948.893	1.283.390	99,03 %	99,80 %	99,99 %	103, 04%	0,10 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GAYAMSARI)	3.139.599.989	3.099.578.281	2.980.800.061	3.245.673.200	3.229.765.812	2.761.716.771	2.794.597.104	2.979.803.406	3.344.493.094	18.346.610	87,96 %	90,16 %	99,97 %	102, 88%	0,57 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CANDILAMA)	1.956.935.420	2.118.317.854	1.626.174.814	1.920.369.000	1.910.967.000	1.751.941.761	1.688.700.941	1.593.561.851	1.975.752.631	6.736.894	89,52 %	79,72 %	97,99 %	122, 50%	0,35 %		

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KAGOK)	1.500.000.000	1.466.292.233	1.646.800.779	1.500.094.500	1.492.750.000	1.429.680.847	1.347.849.839	1.617.460.345	1.837.617.497	2.379.473	95,31 %	91,92 %	98,22 %	106, 53%	0,16 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PEGANDAN)	1.710.000.000	1.925.046.386	1.824.963.265	2.034.417.000	2.024.457.000	1.694.420.244	1.814.873.248	1.798.203.983	2.167.317.608	0	0,00 %	0	0,00 %	112, 61%	0,00 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GENUK)	1.800.000.000	1.819.547.281	2.038.268.255	1.956.644.800	1.947.065.000	1.788.349.905	1.731.152.892	2.034.201.498	2.203.472.983	3.056.242	99,35 %	95,14 %	99,80 %	108, 66%	0,16 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANGETAYU)	2.835.421.000	3.484.264.757	3.620.538.179	4.031.492.000	4.011.754.000	2.686.956.929	3.192.722.445	3.560.849.545	4.380.652.296	3.000.000	94,76 %	91,63 %	98,35 %	112, 80%	0,07 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN)	3.047.508.921	3.339.267.056	3.505.569.008	3.700.886.800	2.682.767.000	2.488.137.890	3.242.984.239	3.414.540.201	4.174.436.477	7.799.068	81,64 %	97,12 %	97,40 %	107, 42%	0,29 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI KULON)	2.765.046.106	2.982.559.421	2.988.302.825	3.420.000.000	3.403.256.000	2.642.588.465	2.698.308.133	2.941.365.754	3.673.741.892	11.570.174	95,57 %	90,47 %	98,43 %	110, 66%	0,34 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KEDUNGMUNDU)	3.993.598.521	3.764.989.989	4.446.618.585	4.482.620.900	4.060.674.000	3.600.342.234	3.680.763.642	4.440.615.541	4.960.436.761	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS ROWOSARI)	2.722.440.200	2.623.932.278	2.598.870.063	2.808.840.000	2.195.088.000	2.412.390.610	2.312.670.960	2.412.982.201	2.998.643.910	9.437.291	88,61 %	88,14 %	92,85 %	106, 76%	0,43 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGESREP)	1.773.640.342	1.907.007.496	1.743.751.878	1.942.509.000	1.932.999.000	1.633.525.535	1.608.451.370	1.720.774.841	2.154.173.453	111.500	92,10 %	84,34 %	98,68 %	110, 90%	0,01 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PADANGSARI)	1.938.787.000	1.950.000.000	2.047.521.039	1.999.634.300	1.989.844.000	1.914.647.151	1.916.053.626	2.033.289.317	2.257.651.977	8.652.638	98,75 %	98,26 %	99,30 %	112, 90%	0,43 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SRONDOL)	1.563.980.937	1.571.992.904	1.564.544.595	1.980.027.000	1.970.333.000	58.090.113	1.407.898.838	1.559.674.140	2.150.219.879	58.090.113	3,71 %	89,56 %	99,69 %	108, 60%	2,95 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PUDAK PAYUNG)	1.431.590.483	1.328.076.607	1.418.220.987	1.563.718.000	1.556.062.000	1.290.452.052	1.279.380.824	1.417.030.147	1.814.497.000	500.000	90,14 %	96,33 %	99,92 %	116, 04%	0,03 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GUNUNGPATI)	2.971.739.960	2.908.168.260	3.052.767.113	3.185.694.000	3.170.097.000	2.760.376.780	2.656.084.377	3.015.208.593	3.812.277.594	12.041.003	92,89 %	91,33 %	98,77 %	119, 70%	0,38 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIJEN)	2.644.190.144	2.721.360.463	2.904.061.223	2.655.163.000	2.642.164.000	2.137.893.781	2.625.107.840	2.810.704.442	3.061.871.520	11.626.995	80,85 %	96,46 %	96,79 %	115, 32%	0,44 %		

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGMALANG)	1.304.102.181	1.434.560.609	1.596.311.095	1.745.221.000	1.736.677.000	1.288.491.867	1.409.439.800	1.563.481.182	1.975.082.474	9.859.271	98,80 %	98,25 %	97,94 %	112, 14%	0,57 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TAMBAKAJI)	1.406.189.320	1.206.222.723	1.489.402.420	1.547.650.000	1.540.073.000	1.404.421.867	1.203.538.003	1.489.365.147	1.600.382.369	1.037.280	99,87 %	99,78 %	100,0 0%	103, 41%	0,07 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PURWOYOSO)	1.045.537.709	1.172.139.095	1.276.418.867	1.424.000.000	1.417.028.000	1.041.394.465	1.103.103.328	1.253.907.085	1.659.347.460	5.700.000	99,60 %	94,11 %	98,24 %	116, 04%	0,40 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGALIYAN)	2.402.095.035	2.919.560.504	3.157.648.758	3.250.000.000	3.234.088.000	2.197.459.891	2.779.959.674	3.064.921.015	3.994.319.699	14.290.38 6	91,48 %	95,22 %	97,06 %	112, 90%	0,44 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANGKANG)	1.784.154.749	1.415.688.290	1.473.878.560	1.464.000.000	1.456.833.000	1.699.553.260	1.313.995.745	1.434.261.627	1.752.339.034	0	0,00 %	0	0,00 %	119. 70%	0,00 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGANYAR)	1.036.285.000	1.134.540.090	1.464.662.651	1.373.390.000	1.366.666.000	7.930.276	0,58%	1.251.717.250	1.535.223.574	7.930.276	0,77 %	0,00 %	85,46 %	111, 78%	0,58 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SEKARAN)	1.947.274.000	1.790.142.170	1.761.164.949	2.000.000.000	1.990.208.000	1.770.927.756	1.667.323.340	1.734.939.510	2.041.571.000	16.922.18 4	90,94 %	93,14 %	98,51 %	102, 08%	0,85 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BULUSAN)					1.000.000.000					0				0,00 %	0,00 %		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PLAMONGANSARI)					1.000.000.000					0				0,00 %	0,00 %		
Laboratorium Kesehatan				1.756.920.000	1.748.318.000				2.685.258.703	0				152, 84%	0,00 %		
RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG		495.229.368.343					473.069.158.514					95,53 %					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		436.735.907.616					414.598.030.270					94,93 %					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		51.244.907.616					49.955.057.332					97,48 %					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		51.193.557.616					49.909.157.332					97,49 %					

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)	-17	-18
DINAS KESEHATAN																	
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		51.350.000					45.900.000					89,39 %					
Peningkat Pelayanan BLUD		385.491.000.000					364.642.972.938					94,59 %					
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		385.491.000.000					364.642.972.938					94,59 %					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		58.493.460.727					58.471.128.244					99,96 %					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		58.493.460.727					58.471.128.244					99,96 %					
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		40.962.995.927					40.962.995.927					100,00%					
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		17.530.464.800					17.508.132.317					99,87 %					

Realisasi Anggaran RSD K.R.M.T. Wongsonegoro

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan (CAGR)		Rata-rata Pertumbuhan (Arithmatic Mean Growth)	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Bidang Kesehatan (RSD K.R.M.T. Wongsonegoro)	436.692.479.050	495.229.368.343	518.847.830.493	594.022.844.029	453.178.402.830	473.069.158.514	480.591.887.176	508.459.384.659	103,78%	95,53%	92,63%	85,60%	8,00	2,92	10,89	3,93

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan (CAGR)		Rata-rata Pertumbuhan (Arithmatic Mean Growth)	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	405.648.258.296	436.735.907.616	390.068.561.234	422.194.748.075	422.389.582.105	414.598.030.270	354.982.744.110	338.528.877.232	104,13%	94,93%	91,01%	80,18%	1,00	-5,38	1,74	-6,95
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	49.696.246	-	-	-	49.023.912	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	n/a	n/a	n/a	n/a
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	28.696.246	-	-	-	28.370.438	0,00%	0,00%	0,00%	98,86%	n/a	n/a	n/a	n/a
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	21.000.000	-	-	-	20.653.474	0,00%	0,00%	0,00%	98,35%	n/a	n/a	n/a	n/a
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	n/a	n/a	n/a	n/a
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.681.121.036	51.244.907.616	57.564.735.646	68.598.537.767	50.435.704.385	49.955.057.332	56.338.071.229	67.700.445.916	95,74%	97,48%	97,87%	98,69%	6,82	7,64	9,59	10,66
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.628.554.036	51.193.557.616	57.517.335.646	68.551.119.000	50.390.554.385	49.909.157.332	56.290.671.229	67.653.045.916	95,75%	97,49%	97,87%	98,69%	6,83	7,64	9,60	10,67
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	52.567.000	51.350.000	47.400.000	47.418.767	45.150.000	45.900.000	47.400.000	47.400.000	85,89%	89,39%	100,00%	99,96%	-2,54	1,22	-3,32	1,64
Peningkatan Pelayanan BLUD	352.967.137.260	385.491.000.000	332.503.825.588	353.546.514.062	371.953.877.720	364.642.972.938	298.644.672.881	270.779.407.404	105,38%	94,59%	89,82%	76,59%	0,04	-7,63	0,60	-9,80
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	352.967.137.260	385.491.000.000	332.503.825.588	353.546.514.062	371.953.877.720	364.642.972.938	298.644.672.881	270.779.407.404	105,38%	94,59%	89,82%	76,59%	0,04	-7,63	0,60	-9,80

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan (CAGR)		Rata-rata Pertumbuhan (Arithmatic Mean Growth)	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	31.044.220.754	58.493.460.727	128.779.269.259	171.828.095.954	30.788.820.725	58.471.128.244	125.609.143.066	169.930.507.427	99,18%	99,96%	97,54%	98,90%	53,38	53,27	80,67	80,01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupatn/Kota	31.044.220.754	58.493.460.727	128.779.269.259	171.828.095.954	30.788.820.725	58.471.128.244	125.609.143.066	169.930.507.427	99,18%	99,96%	97,54%	98,90%	53,38	53,27	80,67	80,01
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	40.962.995.927	50.000.000.000	100.000.000.000	-	40.962.995.927	47.069.857.560	98.294.255.302	0,00%	100,00%	94,14%	98,29%	34,65	24,46	61,03	61,87
Pengembangan Rumah Sakit	-	-	1.634.449.220	-	-	-	1.634.444.460	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31.044.220.754	17.530.464.800	77.144.820.039	71.828.095.954	30.788.820.725	17.508.132.317	76.904.841.046	71.636.252.125	99,18%	99,87%	99,69%	99,73%	23,33	23,51	96,55	96,42

Berdasarkan jumlah keseluruhan anggaran dan realisasinya per tahun dari 2021 hingga 2025, terlihat perbedaan dalam pengalokasian dan pemanfaatan dana kesehatan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2021, total anggaran yang dialokasikan mencapai angka tertinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Tingginya total anggaran pada tahun 2021 disebabkan oleh kebutuhan alokasi pendanaan untuk berbagai program prioritas di bidang kesehatan, termasuk penguatan layanan darurat, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, serta dukungan terhadap sub program kesehatan yang baru dijalankan pada tahun tersebut. Misalnya pada sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) pada tahun 2021, sehingga pengalokasian anggaran lebih besar. Pada tahun-tahun berikutnya, alokasi anggaran untuk program ini mengalami penyesuaian seiring dengan berjalannya implementasi dan optimalisasi program yang telah dibangun.

Selain itu, dampak pandemi Covid – 19 berpengaruh terhadap besarnya anggaran di tahun tersebut mengingat kebutuhan yang meningkat untuk layanan kesehatan darurat dan program pemulihan kesehatan masyarakat. Setelah tahun 2021 total anggaran yang dialokasikan cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang lebih berfokus pada pemeliharaan dan operasional dibandingkan dengan belanja modal atau pengadaan skala besar. Tren ini juga mengindikasikan adanya efisiensi dalam pengelolaan keuangan, di mana program-program yang telah berjalan tidak lagi memerlukan investasi besar, tetapi lebih pada keberlanjutan dan optimalisasi layanan.

Dari sisi realisasi anggaran, terlihat bahwa meskipun alokasi anggaran cukup besar setiap tahunnya, realisasi anggaran cenderung lebih rendah daripada yang direncanakan. Meskipun demikian, realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, program-program yang dirancang benar-benar dijalankan dengan intensitas tinggi, terutama dalam menghadapi kondisi adanya pandemi yang membutuhkan respons cepat.

Pada tahun 2021, anggaran untuk salah satu sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota mencapai angka tertinggi, yaitu Rp5,13 triliun. Namun, realisasi anggaran jauh lebih rendah, hanya sekitar Rp3,60 triliun. Perbedaan signifikan ini terjadi karena berada dalam masa pandemi Covid – 19 sehingga prioritas anggaran akan dialihkan untuk penanganan pandemi. Proses akreditasi banyak tertunda atau di-hold untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan yang tengah fokus menangani lonjakan kasus Covid – 19. Selain itu, adanya pembatasan mobilitas dan kebijakan pembatasan kegiatan juga menghambat proses penilaian dan verifikasi akreditasi di lapangan. Hal ini menyebabkan tidak semua dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi, juga terjadi perubahan dalam alokasi anggaran untuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Semarang. Pada tahun 2021 dan 2022, anggaran yang dialokasikan masih cukup tinggi, terkait dengan kebutuhan tanggap darurat, seperti pandemi. Namun, mulai tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan anggaran yang sangat drastis, yang dapat mengindikasikan bahwa kondisi KLB sudah lebih terkendali dan adanya perubahan kebijakan dalam strategi penanganannya. Selain itu, Selisih antara anggaran dan realisasi pada setiap tahun relatif kecil, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara realistis dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Namun, penurunan dalam alokasi

anggaran perlu menjadi perhatian, terutama terkait dengan kesiapan Kota Semarang dalam menghadapi potensi kejadian luar biasa di masa mendatang. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas, sistem tanggap darurat tetap dapat berjalan optimal dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin.

Pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang menunjukkan tren anggaran yang naik turun, tetapi dengan tingkat realisasi yang hampir maksimal setiap tahunnya. Meskipun realisasi anggaran hampir maksimal, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak berdampak pada akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program dan kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Dengan demikian apabila dilihat dari tren ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana memastikan optimalisasi anggaran yang dialokasikan agar realisasinya lebih maksimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, perlu ada strategi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan kesehatan, misalnya dengan pemanfaatan teknologi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program-program prioritas. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, anggaran kesehatan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

c. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Kesehatan menjalin kemitraan dengan berbagai perangkat daerah (PD) terkait untuk memastikan pelayanan keseahatan berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan. Mitra tersebut antara lain :

No	Mitra Perangkat Daerah	Bentuk Kerjasam/ Kolaborasi	Manfaat/ Hasil yang diharapkan
1	Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)	Perencanaan dan program kesehatan, integrasi data dan penganggaran berbasis kinerja	Program kesehatan selaras dengan RPJMD/RPJMN dan pendanaan tepat sasaran
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Pengelolaan keuangan, penyusunan DPA, penatausahaan belanja kesehatan	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien
3	Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	Penempatan dan pengembangan komptensi ASN tenaga kesehatan	Ketersediaan SDM kesehatan yang merata dan kompeten
4	Dinas Sosial	Pemberian jaminan kesehatan pada masyarakat miskin (PBI) dan koordinasi penanggangan PMKS, bantuan permakanan untuk balita stunting dan bumil KEK	Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan

No	Mitra Perangkat Daerah	Bentuk Kerjasam/ Kolaborasi	Manfaat/ Hasil yang diharapkan
5	Dinas Pendidikan	Program UKS, promosi kesehatan sekolah, intervensi gizi anak dan pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar	Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) disekolah meningkat, prevalensi stunting menurun, pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar meningkat
6	Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan sarana air bersih, sanitasi, drainase Membantu perbaikan infrastruktur jalan yang rusak	Lingkungan sehat
7	Dinas lingkungan Hidup	Pengawasan kualitas air, udara dan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis	Mengurangi resiko penyakit berbasis lingkungan
8	Dinas Tata Ruang	Penyesuaian tata ruang dengan kebutuhan fasilitas kesehatan	Lokasi sarana kesehatan strategis, askes pelayanan lebih mudah, mendukung pemerataan pelayanan
9	Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Layanan rujukan, kolaborasi program pengendalian penyakit	Sistem rujukan berfungsi baik, pelayanan kuratif berjalan optimal
10	BPBD	Kesiapsiagaan bencana/ krisis kesehatan	Pencegahan KLB/ wabah dan respon cepat saat terjadi darurat kesehatan
11	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Pengembangan sistem informasi daerah, membangun keterpaduan komunikasi darurat bencana	Informasi kesehatan tersampaikan, sistem informasi terintegrasi
12	Dinas Ketahanan Pangan	Pengawasan pangan, diversifikasi pangan, keamanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat
13	Dinas Perikanan	Penyediaan sumber protein hewani (ikan) untuk program gizi	Pencegahan stunting, pemenuhan gizi seimbang
14	Dinas Tenaga Kerja	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan program K3	Perlindungan kesehatan pekerja dan produktivitas kerja meningkat
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Program kesehatan ibu & anak, pencegahan KDRT, edukasi kesehatan reproduksi	Perlindungan kesehatan perempuan dan anak terjamin
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan layak huni, air minum dan sanitasi	Lingkungan sehat mendukung kesehatan masyarakat
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program KB, kesehatan reproduksi, pendataan keluarga	Penurunan TFR, peningkatan kesehatan ibu dan anak
18	Dinas pertanian	Produksi pangan bergizi, pengendalian pestisida	Mendukung ketersediaan pangan sehat dan aman

No	Mitra Perangkat Daerah	Bentuk Kerjasam/ Kolaborasi	Manfaat/ Hasil yang diharapkan
19	Dinas Koperasi dan UMKM	Pembinaan UMKM pangan, sertfikasi SPP-IRT	Menjamin makanan olahan memenuhi syarat kesehatan
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perijinan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan	Proses perijinan cepat, fasilitas kesehatan legal sesuai standar
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data kependudukan untuk perencanaan program kesehatan	Sasaran program kesehatan tepat, cakupan layanan meningkat.
22	Satuan Pamong Praja	Membantu dan mendukung setiap kegiatan dalam penanggulangan bencana, penegakan perda kesehatan, pengawasan tempat usaha dan penertiban kawasan bebas rokok	Menciptakan lingkungan sehat dan tertib
23	Dinas Pemadam Kebakaran	Evakuasi penyelamatan korban kecelakaan, bencana alam dan evakuasi gawat darurat Kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran di fsayankes	Keamanan sarana prasarana terjaga
24	Dinas Perhubungan	Rekayasa lalu lintas, penyediaan rambu dan akses ke fasilitas pelaynan kesehatan	Mempermudah akses masyarakat dan ambulan

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan

Dukungan badan usaha milik daerah salah satunya adalah Perumda Air Minum Tirta Moedal dalam penanganan gawat darurat terpadu secara lintas sektoral dan kesehatan masyarakat yaitu membentuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana, pemberian air minum gratis (penyediaan air bersih) serta maintanance alat dan jaringannya.

e. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjamin akses layanan kesehatan dan memperkuat ketahanan kesehatan daerah. Bentuk kerjasama ini meliputi :

1. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah lain (baik provinsi, kabupaten maupun kota) dalam rangka penyelenggaran urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang meliputi koordinasi dan sinergi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten/kota di sekitar Semarang. Bentuk kerja sama ini mencakup penyelenggaraan sistem rujukan pasien, pengendalian penyakit menular lintas wilayah, pemanfaatan laboratorium

kesehatan daerah, hingga pelayanan kesehatan saat terjadi bencana. Melalui kerjasama ini, derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara merata dan komprehensif di kawasan regional.

2. Kerjasama dengan instansi vertikal dan BUMN

Kerjasama dengan Instansi Vertikal adalah bentuk koordinasi dan sinergi Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan kantor perwakilan kementerian/lembaga pusat yang ada di daerah. Sedangkan kerjasama dengan BUMN adalah kolaborasi dengan perusahaan milik negara yang mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan.

Kerjasama Dinas Kesehatan dengan instansi vertikal dan BUMN dilaksanakan untuk memperkuat pelaksanaan program kesehatan nasional dan menjamin keberlangsungan pelayanan.

Bentuk kerjasama vertikal dengan :

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
  Dinas Kesehatan melaksanakan koordinasi program nasional seperti imunisasi, penanganan stunting dan pengendalian penyakit (TBC, HIV/AIDS, SPM Bidang Kesehatan), pembinaan teknis dan bantuan logistik & Vaksin
- BPJS Kesehatan
  Bersama BPJS Kesehatan, pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dapat dioptimalkan, kepesertaan JKN meningkat, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih luas. Kapitasi FKTP dan *claim* bagi rumah sakit.
- BKKBN
  Program keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan pendataan keluarga sangat penting untuk menurunkan TFR dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
- Balai POM
  Pengawasan obat, makanan, kosmetik dan suplemen kesehatan untuk menjamin keamanan produk yang di konsumsi masyarakat.
- PT Kimia Farma & Bio Farma
  Penyediaan obat, vaksin dan logistik farmasi agar ketersediaan obat dan vaksin lebih terjamin.

3. Kerjasama Lintas Perangkat Daerah

Kerjasama lintas perangkat daerah merupakan sinergi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk memastikan pelaksanaan urusan kesehatan berjalan terpadu. Hal ini penting karena banyak faktor penentu kesehatan *(determinants of health*) berada di luar kewenangan Dinas Kesehatan. Bentuk kerja sama meliputi integrasi perencanaan, penyediaan sarana prasarana, penegakan regulasi, penanggulangan bencana, hingga penyediaan data kependudukan. Sinergi ini bertujuan mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, memperkuat layanan promotif-preventif, serta menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan berkualitas.

4. Kerjasama dengan pihak ketiga/ swasta

Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta adalah kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan lembaga non-pemerintah seperti perusahaan swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadana masyarakat (LSM), hingga masyarakat. Kerjasama Dinas Kesehatan Kota

Semarang dengan pihak ketiga/swasta diarahkan untuk memperkuat sumber daya, meningkatkan cakupan intervensi, dan memperluas partisipasi masyarakat.

f. Inovasi Dinas Kesehatan

Inovasi yang sudah dikembangkan atau diterapkan oleh Dinas Kesehatan selama kurun waktu lima tahun terakhir terdapat 106 inovasi tercipta. Inovasi di Dinas Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu inovasi pelayanan dan inovasi managerial.

INOVASI PELAYANAN

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Inovasi pelayanan mencakup perbaikan dalam penyampaian layanan, peningkatan aksesbilitias serta penerapan praktir terbaik dalam pelayanan kesehatan. Inovasi pelayanan meliputi :

Kategori		Inovasi		Keterangan
1	Menurunkan Angka Kematian Ibu Anak	1	SANPIISAN	SANPIISAN (Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang). SAN PIISAN adalah system integrasi lintas sektoral yang menjadi solusi pencegahan kematian ibu dan anak di Kota Semarang. SAN PIISAN berbentuk aplikasi bertujuan mendekatkan akses layanan Kesehatan bagi ibu hamil/bersalin/nifas. Fitur : Konsultasi kehamilan, lapor Bumil, artikel Kesehatan, sarana Kesehatan, Panggilan emergency;
		2	SAYANG BUNDA	Aplikasi SAYANG BUNDA (Aplikasi Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang) untuk ibu hamil dan ibu bersalin yang menginginkan pendampingan atau konsultasi. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas ibu hamil dan memastikan kehamilan terpantau.
		3	GEPUK PEPES	GEPUK PEPES (Gerakan Pekerja Perempuan Sehat). Gepus Pepes adalah program yang mendekatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil di Perusahaan dan Pekerja perempuan. Kegiatan meliputi pemeriksaan kesehatan, ANC Terpadu, Konseling, dan Edukasi, Kelas Ibu Hamil, Waktu Menyusui Ojek ASI, Pelayanan KB, Advokasi-Cuti, Penyediaan Sar-Pras, Ijin Kegiatan di Perusahaan
		4	TUGU MUDA	TUGUMUDA (Catin Bugar Produktif Menuju Keluarga Idaman)
		5	PANTAI MARINA	PANTAI MARINA (Pemantauan Perkembangan dan Stimulasi Anak)
		6	ROBERTO CARLOS	ROBERTO CARLOS (Intervensi Promotif Ibu Hamil serta Mentorship untuk Cegah KEK & Anemi)
		7	NEW PERMAISURI	PERMAISURI (Pemantauan Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas

Kategori		Inovasi		Keterangan
				Kesehatan) merupakan pemantauan pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan terintegrasi dengan tujuan meningkatkan akses & kualitas layanan kesehatan ibu anak melalui pemberdayaan peran aktif masyarakat serta pelayanan rujukan bagi ibu hamil berisiko tinggi ke fasilitas kesehatan secara berkualitas dan berkelanjutan.
		8	KRISNA	KRISNNA (Kolaborasi Bersama Lintas Sektoral dalam Penanganan & Intervensi Bayi Kecil serta Keluarga) merupakan inovasi yang fokus dalam penanganan bayi baru lahir Rendah (BBLR) dan keluarganya melalui pemberian pendamping makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang dan pemeriksaan bayi rutin dan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan.
		9	GEMILANG	GEMILANG (Gerakan pendampingan dokter ahli bagi puskesmas untuk layanan kesehatan ibu dan anak kota semarang) lahir sebagai upaya menjawab tantangan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya terkait komunikasi rujukan yang belum optimal serta perbedaan tata kelola kasus akibat dinamika kebijakan jaminan pembiayaan layanan kesehatan (BPJS). Inovasi ini menghadirkan pendampingan sistematis dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG) serta spesialis anak (SpA) bagi Puskesmas, sehingga layanan primer lebih kuat dalam menangani rujukan kasus risiko tinggi.
		10	TEMAN BUNDA	Data Warehouse TEMAN BUNDA (Sistem Integrasi Data Ibu dan Anak). Meliputi aplikasi SAYANG BUNDA, FMN-RS, FMN-Klinik, SIGASPOL, SIMPUS).
2	Upaya gizi Masyarakat	1	STETOSKOP	STETOSKOP (Skrining faktor kesehatan pada balita stunting oleh dokter spesialis) merupakan kegiatan pemeriksaan dokter spesialis terhadap balita stunting dan masalah gizi langsung di lapangan dengan tujuan untuk mendekatkan akses kesehatan pada masyarakat khususnya balita, Membantu penegakkan diagnosis stunting, Mempermudah rujukan bagi balita stunting yang membutuhkan, dan membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stunting.
		2	PELANGI NUSANTARA	PELANGI NUSANTARA (Pelayanan Gizi dan Penyuluhan Kesehatan Anak serta Remaja), Pelangi

Kategori		Inovasi		Keterangan
				Nusantara (Pelayanan Gizi dan Penyuluhan Kesehatan Anak serta Remaja) merupakan inovasi komprehensif terbagi menjadi dua kegiatan yaitu upaya promotif dan preventif serta upaya kuratif terkait pelayanan kesehatan dalam bidang gizi masyarakat #Bergerak Bersama lintas sektor terkait sehingga menciptakan generasi SEMARANG HEBAT bebas stunting.
		3	LIONAL MESSI	LIONEL MESSI (Layanan Pendampingan Tumbuh Kembang dengan Aplikasi Sayang Anak dan IoT Antropometri Guna Wujudkan Semarang Zero Stunting) .
		4	DAYCARE RUMAH PELITA	RUMAH PELITA (Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor bagi Batuta) merupakan program perbaikan status gizi balita stunting dengan konsep penitipan anak (*daycare*) dengan pendekatan pengoptimalan pola asuh, stimulasi perkembangan, serta pemberian tambahan makanan.
		5	OPTIMUS PRIME	OPTIMUS PRIME (program optimalisasi pelaporan EPPGBM secara berkala melalui pemantauan input data mingguan. Inovasi ini kemudian dikembangkan di tahun 2024 untuk optimalisasi entri EPPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Masyarakat dengan Teknologi Elektronik) dan pemantauan secara harian.
		6	SAYANG ANAK	Sayang anak merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk pemantauan perkembangan dan pertumbuhan anak serta balita, yang digunakan sebagai salah satu upaya penurunan angka stunting di Kota Semarang. dapat diakses melalui https://sayanganak.semarangkota.go.id/.
		7	PITERPAN	PITERPAN (Pelayanan & Edukasi Kesehatan Terpadu Pelajar Kota Semarang) merupakan upaya pelayanan Kesehatan pada usia remaja dengan kegiatan skrining dan edukasi Kesehatan dalam konsep yang fun. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mencegah kejadian penyakit tidak menular dan obesitas pada usia remaja dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup dan makan yang sehat serta skrining Kesehatan. Skrining Kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, cek Kesehatan mata, Kesehatan tulang, cek gula darah sewaktu, pengukuran IMT, dan

Kategori		Inovasi		Keterangan
				disediakan konsultasi gizi serta konsultasi masalah remaja lainnya
		8	RUMAH SIGAP	Siapkan Generasi Anak Berprestasi (SIGAP) merupakan komitmen Tanoto Foundation dalam mendukung Pemerintah Kota Semarang memajukan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini berfokus pada peningkatan pola pengasuhan anak usia 0–3 tahun secara holistik dan terintegrasi, dengan sasaran utama orang tua serta pengasuh sebagai penerima manfaat.
		9	KELUARGA CEMARA	Keluarga Cemara atau Kelas Khusus Cegah Stunting dan Masalah Gizi Terintegrasi merupakan upaya komprehensif yang menyasar tiga kelompok sasaran utama, yaitu ibu hamil, bayi-balita, dan remaja. Untuk ibu hamil, kegiatan meliputi edukasi kesehatan interaktif, praktik pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi lengkap, konseling gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga rujukan bila diperlukan.
3	Mencegah Penyakit Tular Vektor	1	TUNGGAL DARA	TUNGGAL DARA (Bersatu Tanggulangi Demam Berdarah) merupakan inovasi dalam penanggulangan kasus DBD yang terdiri atas tiga fungsi unsur yaitu pencegahan, pengendalian dan pelaporan pemberitahuan kepada petugas dan pemangku wilayah yang dapat dilakukan melalui SMS *gateway* secara *real-time* oleh masyarakat yang melakukan antisipasi penyebaran dengan PSN 3M plus secara mandiri sehingga respons dapat dilakukan dengan cepat. TUNGGAL DARA pernah mendapat penghargaan TOP 99 KIPP tahun 2020.
		2	WINGKO SEMARANG	WINGKO SEMARANG (Wolbachia ing Kota Semarang) merupakan inovasi pengendalian DBD dengan menggunakan teknologi bakteri Wolbachia yang dapat melumpuhkan virus dengue pada nyamuk Aedes Aegypti sehingga tidak bisa lagi menular pada manusia. Cara kerjanya adalah apabila nyamuk Aedes aegypti jantan berwolbachia kawin dengan Aedes aegypti betina lokal tanpa wolbachia maka virus pada nyamuk betina akan terblokir.
		3	SARANGE	SARANGE (Semarang berantas uget-uget dengan teratai dan ikan Cethul) merupakan pengendalian biologis dengan menarik nyamuk atau melokalisasi untuk nyaman bertelur di dalam bejana atau pot tanaman yang berisi air tenang dan daun

Kategori		Inovasi		Keterangan
				teratai kemudian dari telur-telur tersebut berkembang biak menjadi jentik nyamuk yang akan dimakan oleh predator alami yaitu ikan Cetol.
4	Mencegah Penyakit Tidak Menular	1	SINARAN	SINARAN (deteksi dini penyakit tidak menular Kota Semarang) merupakan upaya pencegahan penyakit tidak menular dengan beberapa inovasi turunan yaitu GENDIS LARANG (gerakan deteksi dini pemeriksaan gula darah gratis), WALI HEBAT (skrining dan pengobatan hipertensi), IBUNDA MANIS (ingatkan ibu usia subur periksa IVA dan SADANIS) yaitu kegiatan deteksi dini kanker serviks dan kanker mamae dengan pemeriksaan IVA dan SADANIS bagi wanita usia subur, dan inovasi ELANG JAWA (deteksi dini gangguan kesehatan indera).
		2	IBUNDA MANIS	IBUNDA MANIS (Ingatkan Ibu Usia Subur Periksa IVA/SADANIS dan DNA HPV) merupakan inovasi untuk meningkatkan skrining dan edukasi pada perempuan usia 30-69 tahun yang sudah pernah berhubungan seksual dan dapat dilakukan di seluruh Puskesmas Kota Semarang.
5	Mencegah penyakit Menular Langsung	1	SEMAR BETUL	SEMAR BETUL (semarang berantas tuberkulosis) merupakan inovasi pengendalian TBC berbasis wilayah tinggal yang terintegrasi dengan dukungan sistem informasi digital. SEMAR BETUL bertujuan menurunkan angka kematian TBC dan menurunkan kejadian gagal pengobatan, dengan penanganan berbasis wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi. SEMAR BETUL dilaksanakan dengan penanganan pasien tidak hanya dilakukan oleh faskes pengobatan saja, namun puskesmas wilayah kerja memastikan pasien menyelesaikan pengobatan hingga sembuh.
		2	WARAK NGENDOG	WARAK NGENDOG (lawan coronavirus kota semarang dengan dukungan integrasi program dan bergerak bersama) merupakan suatu program terintegrasi dengan empat aspek utama antara lain 3T, Bidik Prokes, Percepatan Vaksinasi dengan dukungan platform digital STRONG (Integrasi Data *Warehouse* Penanganan Covid Kota Semarang) dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Siaga Candi Hebat dilakukan secara terintegrasi dan bergerak bersama, sehingga COVID-19 dapat dikendalikan dan Kota Semarang mampu mengantisipasi dampak pandemi di masa yang akan datang.

Kategori		Inovasi		Keterangan
		3	LIDYA DIMARI	LIDYA DIMARI (Layanan Tes HIV dan Pengobatan ARV di malam hari) dengan kegiatan pemeriksaan HIV, pengobatan ARV, pendampingan, penjangkauan dan focus group discussion (FGD) dilaksanakan di puskesmas pada malam hari dan dilakukan secara terjadwal. Inovasi LIDYA DIMARI muncul untuk menjawab kebutuhan ODHA yang membutuhkan layanan ekstra diluar jam kerja.
		4	VICTORI	VICTORI (Vaksinasi COVID-19 Kota Semarang Terintegrasi) manajemen pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang yang terintegrasi dengan sistem p-care dari BPJS Kesehatan dan SATU SEHAT Kemenkes RI. VICTORI pernah mendapatkan penghargaan kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi dari IHIA (Indonesia Healthcare Innovation Award) tahun 2021.
		5	RAVATARS	RAVATARS (Respon Cepat Layanan Vaksinasi Kota Semarang Terinterasi) merupakan pencatatan hasil pelayanan imunisasi bayi, balita dan dewasa secara digital. Melalui RAVATARS pengguna bisa melakukan monitor dan pendaftaran serta mendapatkan sertifikat imunisasi secara *online*. Begitu juga dari fasilitas kesehatan puskesmas, bisa memonitor capaian dan *dashboard* imunisasi.
		6	ROTAN SEMAR	ROTAN SEMAR (Program Pengendalian Tuberkulosis Berbasis Wilayah Kota Semarang) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien tuberkulosis dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi melalui upaya nyata bersama lintas sektor.
6	Pengelolaan Integrasi Layanan Kesehatan	1	SIMPANG LIMA	SIMPANG LIMA (Sinergitas dalam penanganan gawat darurat terpadu secara lintas sektor dan bersama masyarakat) adalah bentuk kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan pemangku kepentingan terkait yaitu rumah sakit pemerintah dan swasta, Polrestabes Kota Semarang, relawan gawat darurat, dan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan gawat darurat
		2	KLEOPATRA	KLEOPATRA (Kolaborasi Lintas Sektor Penanganan Kemiskinan Ekstrim, stunting dan TB) merupakan Kolaborasi lintas sektor penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan TBC untuk mengurangi permasalahan gizi dan mengendalikan penyebaran TBC

Kategori		Inovasi		Keterangan
				pada anak. Data menunjukan 9,3% anak stunting di Kota Semarang ternyata terinfeksi TBC sehingga perlu penanganan khusus lintas sektor pada balita dan keluarganya sehingga munculah inovasi KLEOPATRA diawal tahun 2024 ini.
7	Meningkatkan Layanan Kesehatan	1	SILKES	SILKES (Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan) merupakan inovasi yang mencakup pelayanan dari penerimaan sampel sampai keluar hasil secara *online*.
		2	KONTER	KONTER (Konsultasi Dokter) merupakan pelayanan kesehatan berupa konsultasi kesehatan secara *online* oleh dokter umum, yang pada tahun 2024 dikembangkan menjadi PAHALA KENCANA dengan tambahan pelayanan konsultasi dokter spesialis.
		3	PUSKESMAS 7G	PUSKESMAS 7G (Gak Ribet karena pelayanan puskesmas sampai sore hari, Gak Antri karena sudah tersedia layanan antrian *online* melalui PUSTAKA, Gesit karena sudah menerapkan metode *paperless* dan Rekam Medis Elektronik, Gratis pemeriksaan bagi warga ber-KTP Kota Semarang, Go-Cashless pembayaran melalui Go-pay untuk tindakan yang dikenakan biaya, Gemati penilaian indeks kepuasan pelanggan dan Gak Lemot).
		4	PANDANARAN	PANDANARAN (Penanganan Aduan UHC Warga Kota Semarang). Inovasi PANDANARAN adalah sebuah sistem pelayanan pengaduan UHC yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pelayanan ini menggunakan aplikasi SIM UHC yang mengintegrasikan berbagai pihak, seperti Dispendukcapil, BPJS Kesehatan, dan Rumah Sakit, untuk mempercepat proses penyelesaian aduan.
		5	PANGERAN DIPONEGORO	PANGERAN DIPONEGORO (Pencapaian Program Uhc Kota Semarang 100 % Didukung Peran Lintas Program Dan Lintas Sektor Secara Gotong Royong). Program Pangeran Diponegoro merupakan inovasi yang bertujuan mempercepat peningkatan capaian program UHC Kota Semarang guna menerapkan jaminan kesehatan nasional (JKN) kepada seluruh masyarakat Kota Semarang yang berjumlah 114.453 jiwa. Inovasi pada program Universal Health Coverage (UHC) Kota Semarang ini didukung oleh peran lintas program dan lintas sektor

Kategori		Inovasi		Keterangan
				Jaminan Kesehatan Semesta Universal Health Coverage (Uhc). Program Universal Health Coverage (Uhc) yaitu jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota semarang untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan pelayanan rumah sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
		6	SIRAWIT	SIRAWIAT (Siap Rawat, Siap Intervasi) adalah layanan yang dilakukan oleh ambulans siaga yang terdiri dari *home care*, P3K, Perkesmas, PIS-PK, skrining kesehatan dan antar jemput).
		7	GALAKSI BIMASAKTI	GALAKSI BIMASAKTI (Warga dan Ambulan Hebat dalam Aksi Menuju Safe Community) merupakan integrasi layanan ambulan kegawatan atau Ambulan Hebat (AH) Kota Semarang dan pemberdayaan relawan yang sudah dilatih BHD (bantuan hidup dasar) oleh tim AH untuk memberikan pertolongan pada kasus gawat darurat sebelum tim AH datang.
		8	SIPULEN	Sistem pengisian umpan balik pelanggan atau pasien secara online.
		9	RONALDO	RONALDO (Robot Layanan Publik Dinas Kesehatan Kota Semarang), Konsep pelayanan masyarakat di Dinas Kesehatan secara mandiri yang dibantu dengan sistem robotik cerdas (kecerdasan buatan). RONALDO pernah masuk 10 Besar pada IHIA (Indonesia Healthcare Innovation Award) tahun 2022 Kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi.
		10	PANGERAN ANTASARI	Pengembangan pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) Kota Semarang melalui partisipasi masyarakat dan swasta secara gotong royong dengan memanfaatkan CSR dari swasta dan pilah sampah.
		11	REG-OL LABKES	Pelayanan pendaftaran/registrasi pelanggan secara online untuk mempercepat layanan tanpa antrian di Laboratorium Kesehatan.
		12	GRAND MAEROKOCO	GRAND MAEROKOCO (Gerakan Pelatihan Kader Mengenai Pengukuran Antropometri, Konseling, serta cara Plotting KMS) program peningkatan kapasitas kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan, pencatatan, serta edukasi gizi di posyandu.
		13	CEMPAKA	CEMPAKA (Cegah Stunting Bersama Pengusaha Kota Semarang) merupakan program pencegahan stunting melibatkan Asosiasi

Kategori		Inovasi		Keterangan
				Pengusaha Hotel dan Katering dalam pemberian makanan tambahan bagi balita risiko stunting (*underweight, wasting, weight-faltering*).
		14	SULTAN	SULTAN (Konsultasi Kesehatan) adalah aplikasi layanan konsultasi kesehatan bagi warga Kota Semarang dengan dokter umum dan spesialis (spesialis jiwa dan penyakit dalam).
		15	mini PAKHUWON	Pusat kegiatan khusus warga lansia dengan kemandirian, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan lansia serta mendorong lansia menjadi agen perubahan kesehatan di lingkungan lansia keluarga maupun masyarakat atau komunitas.
		16	PERGI KE SORGA	Pelayanan perawatan gratis pada kasus paliatif bagi warga Kota Semarang merupakan perawatan kesehatan pada kondisi pasien paliatif, serta edukasi pentingnya kemandirian perawatan oleh keluarga.
		17	RONALDIA	Robot Layanan Dinas Kesehatan boleh Tanya Apapun ke Dia (RONALDIA) merupakan pengembangan dari RONALDO yang juga berbasis kecerdasan buatan. Robot ini yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk interaksi dan navigasi dengan menggunakan 6 servo untuk menggerakkan lengan kiri, kanan, dan kepala.
8	Upaya Preventif dan promotif	1	LAWANG SEWU	LAWANG SEWU (Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu). LAWANG SEWU (Layanan Warga Kota Semarang Sehat Setiap Waktu) adalah kegiatan yang meliputi senam Bersama, pemeriksaan Kesehatan umum, rockport dan tes kebugaran lainnya di Pusat olahraga tri Lomba Juang Semarang.
		2	UCOK BABA	UCOK BABA (uji screening bahan air dan bahan makanan) adalah inovasi untuk mencegah penyakit akibat cemaran makanan dan minuman untuk peningkatan hygiene sanitasi dalam pengelolaan makanan di kantin sekolah.
		3	HOME CARE Lab	Pelayanan sampling ke lokasi pelanggan, baik untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat maupun laboratorium klinik.
		4	DUTA SEHAT	Edukasi rutin kesehatan untuk masyarakat bugar dan sehat melalui media sosial.
		5	MELON MUSK	MELON MUSK (Milenial Bergotong-royong Mengentaskan Stunting di Kota Semarang) merupakan program pengentasan stunting yang

Kategori		Inovasi		Keterangan
				melibatkan remaja milenial dalam edukasi, promosi, dan menyalurkan bantuan makanan bagi balita dan ibu hamil.
		6	PAPANDAYAN	PAPANDAYAN (pemeriksaan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di dukung lintas sektoral dan peran masyarakat kota semarang (papandayan) yang bertujuan untuk menurunkan angka penyakit akibat lingkungan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dan terciptanya keterpaduan kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat.
		7	HANS HEBAT	HANS HEBAT (urban farming, lahan sempit berinvestasi sehat) adalah pengembangan asuhan mandiri tanaman obat keluarga serta penanaman sayur dan buah-buahan di pekarangan puskesmas
		8	GAS MASBRO	GAS MASBRO (cegah obesitas dengan makanan sehat dan berolahraga) program yang mengkolaborasikan aktivitas fisik dan diet gizi seimbang untuk menuju Indeks Masa Tubuh (IMT) normal pada pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang dan UPTD Puskesmas. Kegiatan GAS MASBRO seperti pemantauan IMT dan wajib aktivitas fisik di fasilitas *gym center* yang disediakan di kantor bagi setiap pegawai untuk pencegahan obesitas pada pegawai.
		9	CAKRAWALA BUANA	CKRWALA BUANA adalah sistem kerentanan wilayah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang berbasis analitik data pelayanan. CKRWALA BUANA dikembangkan untuk menilai dampak kesehatan dengan menggunakan pendekatan praktik yang digunakan untuk menilai potensi dampak kesehatan dari suatu kebijakan, program atau kegiatan terhadapat masyarakat Kota Semarang.
		10	MENTTARI SEHAT NUSANTARA	MENTTARI SEHAT NUSANTARA (Medical Check up untuk deteksi dini penyakit menuju Semarang Semakin Sehat dan Sejahtera) merupakan inovasi skrining kesehatan dengan pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga.
		11	ESEMKA	Elektronik skrining mandiri kesehatan jiwa melalui pemeriksaan

Kategori		Inovasi		Keterangan
				SRQ dan SDQ pada anak-anak dan dewasa
		12	PERWIRA SEKTI	PERWIRA SEKTI (pengurusan wirausaha produk industri rumah tangga dan sertifikat laik higiene sanitasi) adalah platform yang berisi informasi terkait izin pangan PIRT (pangan industri rumah tangga) dan SLHS (sertifikat laik higiene sanitasi) meliputi alur, persyaratan, video tutorial, pelayanan dan pendampingan serta konsultasi *online*.
		13	PUSAKA	Pelayanan kesehatan dalam menghadapi situasi-situasi krisis yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit menular, bencana alam, kecelakaan massal, insiden kesehatan masyarakat, dan ancaman kesehatan global.
		14	SEMAWIS	SEMAWIS (Semarang wujudkan masyarakat sehat sejahtera melalui PIS-PK) merupakan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui program PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) yang membawa dimensi progresif dan holistik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat.
		15	KATULISTIWA	KATULISTIWA (Katalis Otomasi dan Integrasi Sistem Teknologi Informasi Untuk Pengumpulan Data Cuaca Berbasis IoT di wilayah Kota Semarang) merupakan inovasi untuk mempercepat dalam penerapan teknologi informasi dan otomasi di bidang meteorologi. Penggunaan teknologi untuk mengotomatiskan proses manajemen data cuaca, mengurangi intervensi manusia, dan meningkatkan efisiensi.
		16	LINSEK TEMATIK	Forum kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan secara fokus dan terarah berdasarkan tema & isu prioritas wilayah yang melibatkan Lintas Sektor untuk berkontribusi aktif sesuai perannya, berdasarkan peta risiko kesehatan wilayah.
		17	BLOKOSUTO	BLOKOSUTO (Belajar Bersama Tingkat Lokal Sambil Berbagi Keberhasilan Antar Kader) adalah inovasi kegiatan sharing antar wilayah yang melibatkan kader kesehatan sebagai peserta utama. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk 9 kelas paralel (Kelas Pencegahan penyakit menular & tidak menular, imunisasi, Kesehatan mental, kesehatan ibu dan anak, gizi & pencegahan stunting, PHBS, UHC

Kategori		Inovasi		Keterangan
				dan perijinan) sehingga setiap kelas bisa membahas topik atau pengalaman berbeda secara bersamaan. Konsep BLOKOSUTO bertujuan untuk memfasilitasi belajar bersama, berbagi keberhasilan, dan meningkatkan kapasitas kader di tingkat lokal melalui komunikasi dan kolaborasi antar wilayah.
		18	LINCAH	LINCAH (Kolaborasi Lintas Sektor Tematik Berbasis Peta Risiko Wilayah untuk Ketahanan Kesehatan Kota Semarang) Lincah adalah inovasi kolaboratif di Kota Semarang yang mengintegrasikan pemetaan risiko kesehatan dengan forum diskusi rutin lintas sektor untuk merancang dan melaksanakan intervensi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah, menciptakan nilai tambah berupa ketahanan kesehatan yang lebih responsif, efisien, dan tepat sasaran dibanding pendekatan seragam sebelumnya
		19	7BINTANG	7BINTANG Pendekatan Pencegahan Masalah Kesehatan di Tingkat RT/RW. Inovasi 7 Bintang ini bertujuan untuk menggali dan menangani permasalahan kesehatan yang ada di tingkat Desa/Wilayah Masyarakat (Desawiosmas), dengan fokus pada 7 pertanyaan kesehatan. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat intervensi dalam menangani masalah kesehatan yang muncul, sehingga dapat mencegah berkembangnya masalah yang lebih besar.
		20	SAYANG BETA	Sayang Beta (Simplifikasi Layanan dan Pendampingan Kesehatan Remaja dan Dewasa Terintegrasi Berbasis Elektronik Kota Semarang) merupakan inovasi layanan kesehatan berbasis digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses, pendampingan, serta edukasi kesehatan bagi remaja dan dewasa secara terintegrasi. Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan kesehatan dengan lebih cepat, praktis, dan sesuai kebutuhan, sehingga mendukung upaya promotif dan preventif di Kota Semarang.
9	Digital Terintegrasi	1	TEMAN BUNDA	TEMAN BUNDA (*sysTem integrated maternal newborn and neonatal semarang*) merupakan manajemen *big data* ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir Pemerintah Kota

Kategori		Inovasi		Keterangan
				Semarang melalui Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan mengembangkan satu data *warehouse*.
		2	LEK MINKES	LEKMINKES (Laporan Eksekutif dan Informasi Kesehatan) Dashboard Kesehatan Kota Semarang. Platform digital berbasis website Dinas Kesehatan Kota Semarang tentang informasi data kesehatan di Kota Semarang;
		3	YOH SEHAT	*Platform* sistem kesehatan cerdas yg memuat semua kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di Kota Semarang secara mudah, lengkap, dan terpercaya. Pengguna YOH SEHAT dapat mengakses informasi riwayat kunjungan ke fasilitas kesehatan serta riwayat hasil pemeriksaan kesehatan.
		4	PIONIR	Aplikasi Digital Rekomendasi Perijinan Sarana Kesehatan Terpadu aplikasi untuk manajemen data pelayanan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan.
		5	PANGLIMA SUDIRMAN	PANGLIMA SUDIRMAN (Program Percepatan Penurunan Penyakit Menular melalui Sistem Distribusi Kerentanan Penyakit Tuberkulosis) merupakan sistem distribusi kerentanan penyakit yang menggunakan AI (*artificial intelligence*), dibuat untuk mengenali dan memberikan pengambilan keputusan atas resiko TBC.
		6	ANJASWARA	ANJASWARA (Anjungan Kesehatan Mandiri Warga Kota Semarang) merupakan alat skrining kesehatan berbasis IOT yang terdiri dari tiga komponen yaitu tinggi badan, berat badan dan pemeriksaan gula, dan selanjutnya akan dikembangkan oleh berbagai skrining Kesehatan.
		7	STRONG	STRONG (Integrasi Data Warehouse Penanganan COVID-19 Kota Semarang) merupakan Konsep integrasi penanganan COVID-19 di Kota Semarang yang terintegrasi dengan lintas sektor. STRONG pernah mendapat penghargaan Platinum dan Pemenang Favorit pada IHIA (Indonesia Healthcare Innovation Award) tahun 2020 – Kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi.

INOVASI MANAJERIAL

Inovasi manajerial merujuk pada inovasi dalam praktek manajemen, termasuk proses dan teknik yang dapat menciptakan nilai bagi organisasi,

termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Inovasi dalam kategori ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Kategori		Inovasi		Keterangan
1	Organisasi	1	GO-ATEM	Pelayanan tenaga atem berupa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
		2	RADEN PATAH	Kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan perguruan tinggi Kota Semarang dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Kota Semarang melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
		3	SIMANIS	SIMANIS (sistem informasi pengajuan persetujuan permintaan dan pengadaan obat terintegrasi) merupakan aplikasi web untuk pengajuan permintaan (Puskesmas dan RS) untuk obat program (Puskesmas dan RS), BMHP PRB (Puskesmas), BMHP CKG (Puskesmas), obat gadar dan lain-lain (Puskesmas) dengan fitur terbaru yakni integrasi dengan SOBAT IF, laporan distribusi dari IF ke fasyankes, stok obat program *real-time* khusus untuk user bidang program DKK, dan laporan analisis permintaan dengan pemberian.
		4	SERUNI	SERUNI (sistem monitoring suhu *cold chain* di instalasi farmasi) merupakan pemantauan dan pencatatan suhu *cold chain* dalam penyimpanan vaksin dengan aplikasi *Cold chain* Temperature Monitoring Form (CTMF).
		5	PERMEN MADU	Sistem pengelolaan rekaman dan dokumen manajemen dan administrasi terpadu milik laboratorium kesehatan
		6	SOBAT IF	SOBAT IF (Sistem Obat Instalasi Farmasi) adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan ketersediaan obat dan BMHP sehingga tidak terjadi kekosongan obat. Stok dapat dilihat secara real-time dan setiap obat sudah ada barcode sehingga memudahkan untuk penelusuran.
		7	SELARAS	Sistem informasi pengelolaan perbekalan farmasi lintas sektor di instalasi farmasi sistem yang memberikan informasi tentang pengelolaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi kepada Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya.
		8	MENTARI	Sistem pemeliharaan barang inventaris di instalasi farmasi merupakan pemantauan dan pencatatan pengelolaan inventaris barang yang ada di instalasi farmasi
		9	AKAPELA	AKAPELA (AKuntansi Aset, PEndapatan, dan beLAnja) adalah inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan data aset/ barang milik daerah secara tepat melalui penggunaan excel makro dan mikro.
		10	MAHAPATIH GAJAHMADA	MAHAPATIH GAJAHMADA (Bergerak Bersama Menghadapi Gangguan dan

Kategori		Inovasi		Keterangan
				Rintangan Demi Terciptanya Masyarakat Aman, Nyaman dan Sejahtera) merupakan upaya bergerak bersama dalam menghadapi issue/ masalah masyarakat dengan menekankan pada kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi demi terciptanya masyarakat yang sehat dan kualitas hidup yang baik.
		11	POPAI	POPAI (Laporan Pengendalian Gratifikasi Dinas Kesehatan Kota Semarang) adalah inovasi yang menjadi wadah pelaporan serta edukasi dan konsultasi tentang gratifikasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang.
		12	NAVARA	Navara (Layanan *Service* Barang Operasional Dinas Kesehatan Kota Semarang) adalah inovasi yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi sarana prasarana di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Aplikasi NAVARA dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Semarang
		13	SARIWANGY	SARIWANGY (Ketersediaan dan Monitoring Wajib Obat Program Puskesmas Kota Semarang) adalah inovasi berbasis *One Gate Policy* untuk mengatasi penumpukan, kerusakan, dan resiko kadaluarsa obat program di Puskesmas.
		14	PARASSETAMOL	PARASSETAMOL (Panduan Praktik Klinis untuk Peresepan Dokter atau Dokter Gigi dalam Memberikan Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan Kota Semarang) dirancang untuk memberikan panduan yang jelas, terstandar, dan berbasis bukti klinis dan ilmiah kepada tenaga medis dalam memberikan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Panduan ini bertujuan untuk memastikan praktik klinis berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai standar.
		15	SARIPOESPA	SARIPOESPA (Desk Anggaran Sediaan Farmasi Puskesmas untuk Pemenuhan Obat dan BMHP) adalah inovasi Instalasi Farmasi dalam melakukan koordinasi dengan pengelola farmasi puskesmas dan memantau melalui LPLPO, (PKP) Penilaian Kinerja Puskesmas setiap bulan untuk pemenuhan anggaran pengadaan obat dan BMHP.
		16	EPPINEFRIN	EPPINEFRIN (Evaluasi Pelayanan Kefarmasian Komunitas melalui Jejaring Apotek yang Dilakukan Puskesmas). Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan pelayanan farmasi klinis, khususnya dalam komunitas. Melalui EPPINEFRIN, jejaring antara puskesmas dan apotek akan diperkuat guna memastikan aksesibilitas pelayanan kefarmasian yang lebih efektif dan tepat guna, sehingga mendukung kualitas pengobatan masyarakat secara menyeluruh.

Kategori		Inovasi		Keterangan
		17	LIMOSIEN	LIMOSIEN (Layanan Izin Magang Online Mahasiswa & Penelitian) adalah sebuah sistem berbasis daring yang dapat diakses melalui alamat: https://limosien.dinkes.semarangkota.go.id/. Layanan ini dirancang untuk mempermudah proses pengajuan, pengelolaan, dan penerbitan izin magang maupun penelitian bagi mahasiswa. Melalui platform ini, seluruh tahapan perizinan dapat dilakukan secara online sehingga lebih efisien, transparan, dan mudah diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke instansi terkait. Dengan adanya LIMOSIEN, mahasiswa maupun lembaga penyelenggara dapat menghemat waktu, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses administrasi perizinan secara terintegrasi.
		18	SIMETIKON	SIMETIKON (Sistem Pelayanan dan Konsultasi Apotek dan Toko Obat) merupakan layanan konsultasi bagi pelaku usaha Apotek dan Toko Obat yang mengalami kesulitan dalam proses perizinan melalui OSS RBA. Sistem ini menjadi wadah untuk menampung pertanyaan dan keluhan, sekaligus memberikan informasi yang jelas dan praktis terkait perizinan. Evaluasi dilakukan setiap triwulan agar kualitas pelayanan perizinan di Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan terus meningkat
		19	MELATI SEMARANG	MELATI SEMARANG (Monitoring dan Evaluasi Apotek dan Toko Obat di Kota Semarang) dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan serta kesesuaian pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh Apotek dan Toko Obat. Program ini bertujuan memastikan standar pelayanan tetap terjaga, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.
		20	LANSOPRASOL	LANSOPRASOL adalah inovasi evaluasi pelayanan kefarmasian dengan menilai hasil Penilaian Obat Rasional (POR) dan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang tercatat di SIMPUS. Melalui evaluasi ini, Dinas Kesehatan dapat mengetahui efektivitas penggunaan obat yang diberikan oleh Puskesmas kepada pasien, sekaligus mendorong penggunaan obat secara rasional.
		21	SAFARI GEMA CERMAT	SAFARI GEMA CERMAT (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) merupakan kegiatan penyuluhan keliling ke kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat yang tepat, rasional, serta cara menyimpan dan membuang obat dengan benar. Inovasi ini hadir untuk mengurangi risiko penyalahgunaan obat dan meningkatkan efektivitas pengobatan.
		22	DUL KOLAK	DUL KOLAK (Edukasi Obat Anak Sekolah Kota Semarang) adalah program edukasi bagi pelajar sekolah dasar hingga

Kategori		Inovasi		Keterangan
				menengah terkait penggunaan obat yang aman dan sesuai aturan. Melalui kegiatan ini, anak-anak dibekali pengetahuan dasar tentang obat agar lebih bijak dalam mengonsumsinya serta terhindar dari potensi penyalahgunaan.
		23	PESONA	PESONA (Penyuluhan Edukasi Sosialisasi NAPZA Sekolah SMA) difokuskan untuk siswa SMA dengan memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran remaja akan risiko narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, sekaligus mendorong pola hidup sehat tanpa penyalahgunaan obat.
		24	PUKIS	PUKIS (Pelayanan Perizinan dan Konsultasi PIRT) adalah layanan perizinan pangan industri rumah tangga yang diberikan secara gratis oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selain memfasilitasi penerbitan izin PIRT, pelaku usaha juga mendapat penyuluhan keamanan pangan sebagai syarat perizinan, sehingga produk yang beredar aman, sehat, dan sesuai standar.
		25	SUPER SEMAR	SUPER SEMAR (Survey Pelayanan PIRT Dinas Kesehatan Kota Semarang) merupakan program monitoring dan evaluasi pelayanan PIRT, mulai dari proses perizinan, penyuluhan, hingga visitasi pada industri rumah tangga pangan. Evaluasi ini menggunakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan PIRT di tahun-tahun berikutnya.
		26	NERACA	NERACA (Penatalaksanaan Pengelolaan dan Verifikasi Keuangan Cepat Akurat) merupakan inovasi yang dikembangkan untuk mengatasi kendala pelaporan SPJ BOK, BLUD Puskesmas, serta bidang di DKK yang belum sesuai ketentuan. Melalui tautan https://smg.city/rkospjdkk, Puskesmas dapat mengisi ROP bulanan/tahunan, mengunggah dokumen SPJ asli, dan menyampaikannya secara daring. Tim verifikator keuangan akan melakukan pengecekan serta memberikan catatan perbaikan yang wajib diselesaikan maksimal 1 hari kerja. Selanjutnya, berkas diverifikasi di Subbagian Keuangan dan BMD untuk mendapatkan stempel verifikasi paling lambat tanggal 5 setiap bulan, sehingga proses pelaporan lebih tertib, akurat, dan efisien.
		27	BASKET	BASKET (Berita Acara Serah Terima Elektronik) adalah sistem digital yang digunakan untuk mempermudah dan menertibkan proses serah terima barang/jasa hasil belanja modal maupun belanja persediaan. Melalui platform ini, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diwajibkan mengajukan dokumen BAST setelah barang atau jasa diterima dari penyedia. Pengurus Barang pada Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) kemudian memverifikasi kesesuaian dan kelengkapan barang,

Kategori		Inovasi		Keterangan
				sehingga proses serah terima lebih transparan, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.
		28	MARIO	MARIO (Majukan Akuntabilitas Raih Integritas Orientasi Layanan) adalah inovasi penguatan tata kelola keuangan dan kinerja berbasis transparansi, integritas, serta pelayanan publik, di mana fungsi pengawasan berperan tidak hanya sebagai pengendali kepatuhan tetapi juga sebagai konsultan dan katalisator perbaikan layanan.
		29	SLANG	SLANG (Stop, Laporkan, Anti Negosiasi, Gratifikasi) merupakan kampanye dan edukasi mengenai gratifikasi melalui pelayanan kesehatan dan tim TPCB guna mencegah gratifikasi dan menjaga integritas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang.
		30	KEREN MAS	KEREN MAS (Penilaian Kinerja Puskesmas Berbasis Online Terintegrasi Dinas Kesehatan Kota Semarang) adalah sistem penilaian kinerja Puskesmas yang dilakukan secara online dan terhubung langsung dengan Dinas Kesehatan. Inovasi ini memudahkan monitoring capaian kinerja secara real-time, meningkatkan transparansi, serta menjadi dasar evaluasi untuk pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas.
		31	MONASS	MONASS (Modelling Pembangunan Kesehatan Kota Semarang) merupakan inovasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, khususnya pembangunan gedung atau bangunan kesehatan di Kota Semarang. Melalui pendekatan modelling, kebutuhan infrastruktur dianalisis secara terarah sehingga pembangunan fasilitas kesehatan lebih tepat sasaran, efisien, dan mendukung pelayanan yang merata bagi masyarakat.
		32	MONALISA	MONALISA (Monitoring dan Evaluasi Belanja Modal dan Pengadaan Barang Jasa Dinas Kesehatan Kota Semarang) adalah inovasi pengawasan dan evaluasi belanja modal serta pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kesehatan. Program ini memastikan seluruh proses pengadaan sesuai aturan, transparan, akuntabel, serta mendukung efektivitas penggunaan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
		33	JAMBRONG	JAMBRONG (Jadwal Kolaborasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang) adalah inovasi berupa sistem penjadwalan kegiatan yang diisi oleh setiap bidang secara harian, sehingga seluruh unit kerja dapat saling mengetahui agenda masing-masing. Dengan adanya JAMBRONG, potensi tumpang tindih kegiatan dapat diminimalisir, koordinasi menjadi lebih efektif, serta tercipta kolaborasi lintas bidang yang lebih terencana dan sinergis dalam mendukung pencapaian program prioritas Dinas Kesehatan.

Kategori		Inovasi		Keterangan
2	Peningkatan SDM	1	My Darling	MY DARLING (Aplikasi Manajemen Layanan Terpadu Pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang) aplikasi *mobile* yang mengintegrasikan layanan bagi pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang.
		2	PEKUNDEN	Pelayanan Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Semarang (PEKUNDEN) berupa Hotline WA di nomor 081327899220, merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk edukasi penyampaian informasi terkini tentang layanan kepegawaian di Dinas Kesehatan dan konsultasi/tanya jawab seputar kepegawaian. Produk informasi yang ada dalam PEKUNDEN adalah Kenaikan Gaji Berkala, Cuti, Pensiun, Mutasi Pegawai, Kenaikan Pangkat, kenaikan Jabatan
		3	PINKCARE-U	PINKCARE-U (Pembinaan Mental, Bimbingan, dan Konsultasi Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan Kota Semarang) adalah inovasi pembinaan pegawai yang dilaksanakan melalui empat tahap: pra mitigasi dengan pemetaan pegawai yang berisiko (disiplin rendah, kinerja di bawah ekspektasi, masalah pribadi atau perilaku berisiko), preventif berupa pembinaan mental bulanan serta layanan konsultasi melalui WhatsApp PEKUNDEN atau tatap muka, *action* berupa pemanggilan, mediasi, dan tindak lanjut atas laporan dari atasan maupun masyarakat, serta evaluasi melalui *monitoring* dan *assessment* untuk menilai progres peningkatan kinerja pegawai, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan berintegritas.
		4	Start Up	Start Up (STrategi ApaRaTur dalam Upaya Pengembangan Kompetensi) adalah inovasi pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang yang memungkinkan Sekretariat, Bidang, dan UPTD untuk mengusulkan kebutuhan maupun rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi secara daring melalui link https://smg.city/startup2025. Jenis pengembangan kompetensi yang dapat diajukan meliputi workshop, webinar, seminar, on the job training, pendidikan dan pelatihan, serta bentuk peningkatan kapasitas lainnya, sehingga aparatur dapat terus meningkatkan keterampilan dan profesionalisme dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.

g. Penghargaan Dinas Kesehatan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Urusan Wajib Kesehatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir antara lain :

1. Inovasi *SAN PIISAN* (Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang mendapatkan penghargaan *Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021*

2. Makin STRONG Lawan Covid-19 dengan VICTORI mendapatkan Platinum Award dan Favorite Award kategori IT Kesehatan pada Indonesia healthcare Innovation Award V – 2021
3. Public Service Of The Year Semarang 2021 dari Markplus
4. TOP Inovasi Pelayanan Publik Terpuji dengan Inovasi WARAK NGENDOG (Lawan Corona Virus Kota Semarang dengan Dukungan Integrasi Program dan Bergerak Bersama) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
5. Indonesia Healthcare Innovation Award kategori GERMAS-GOLD AWARD Inovasi Pelangi Nusantara Penanganan Stunting dan Gizi Buruk di Semarang dari IndoHCF (Indonesia Healthcare Forum);
6. Juara III Video Semarak Patroli Mobile JKN, BPJS Kesehatan;
7. Juara II Kategori Skrining Riwayat Kesehatan Festival SEMAWIS (Faskes Semarang Aware Informasi JKN-KIS) HUT BPJS Kesehatan ke-54;
8. Meraih GOLD dan SILVER award dalam kompetisi KAIZEN tingkat nasional 2022;
9. Penghargaan IKS Indeks keluarga Sehat Terbaik Se Jawa Tengah;
10. Penghargaan atas dukungan dan Kontribusi dalam Program Jaminan kesehatan Nasional dengan pencapaian Universal Health Coverage
11. Top 45 Kompetensi inovasi pelayanan publik dari Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi PANGERAN DIPONEGORO
12. Penghargaan IHIA (INDONESIA HEALTHCARE INNOVATION AWARD) GOLD AWARD kategori GERMAS intervensi promotif ibu hamil serta mentorship untuk cegah anemia dan kurang energi kronik INOVASI ROBERTO CARLOS
13. Penghargaan IHIA (INDONESIA HEALTHCARE INNOVATION AWARD) DIAMOND AWARD Terbaik Ke 1 kategori SPGDT
14. PUBLIC SERVICE RESPONSIVE GENDER penghargaan dari UN Publik Service PBB di Korea Selatan;
15. STBM Award Kategori Madya: Penghargaan bergengsi yang diterima Kota Semarang pada tahun 2024;
16. Penghargaan Terbaik I dalam Pengelolaan DAK NF POM: Penghargaan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang atas kinerja dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) POM tahun 2024;
17. UHC Award Kategori Madya: Penghargaan yang diterima Kota Semarang pada tahun 2024;
18. Penghargaan Puskesmas Dengan Capaian Zero Dose Terendah berdasarkan ASIK Imunisasi: Penghargaan yang diterima Puskesmas Tlogosari Wetan pada tahun 2024;
19. Public Services of The Year Jawa Tengah 2025 dalam acara Public Services for Impact 2025 tanggal 5 Agustus 2025
20. Penghargaan Badan Publik KIP Prov Jateng : Pemenang Kategori Terbaik Kelompok Rumah Sakit Kab / Kota se- Jawa Tengah.
21. Penghargaan Badan Publik KIP Prov Jateng : Kategori “SATYA TINARBUKA”.
22. Penghargaan dari National Award Foundation, Kategori “Succesfull Women in Leadership” dalam acara Succesful Women Award 2021”
23. Penghargaan dari National Award Foundation, Kategori “The Best Choice In Hospital Award 2021”

24. Penghargaan Badan Publik KIP Prov Jateng, Kategori “Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021”
25. Penghargaan Service Exellence During a Pandemic dari Seven Media Asia Award Sebagai “TOP BUMD 2021”
26. RSWN berhasil meraih AKREDITASI dengan predikat lulus PARIPURNA oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP);
27. RSWN Juara II PONEK Tingkat Prov. Jawa Tengah;
28. RSWN menerima penghargaan kategori Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
29. Pada tahun 2023, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro mendapatkan prestasi dan penghargaan sebagai berikut :
30. Fasilitator Penguatan Tata Kelola Keuangan BLUD dan Best Practice Pengelolaan Keuangan BLUD berbasis sIstem informasi terintegrasi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, 2023;
31. Komitmen Rumah Sakit Dalam Implementasi Integrasi Sistem Antrian Online dan Integrasi Sistem Klaim dari BPJS Kesehatan, 2023;
32. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Sebagai TOP 5 (Kategori Kab./Kota) Inovasi Pelayanan Publik Prov. Jawa Tengah untuk Aplikasi SI RINDU (Sistem Informasi Harian Teadu), 2023;
33. Juara I Implementasi Urban Farming Tingkat Kota Semarang, 2023;
34. Juara 1 Lomba Gelar Budaya Kerja Tim KBK PERAWAT MUMPUNI (Melayani Semua Masyarakat Sepenuh Hati Nurani) Tingkat Kota Semarang, 2023;
35. Peringkat II OPD dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2023 dari Wali Kota Semarang;
36. Juara 1 Lomba Drainase Tingkat Kota Semarang, 2023;
37. Juara 2 Lomba Lampah Kita (Pengelolaan Sampah) Tingkat Kota Semarang, 2023;
38. GOLD AWARD Indonesia Health Care Innovation Award, yang diselenggarakan oleh Indonesia Health Care Forum dengan inovasi SI RINDU, 2023;
39. Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dari KEMENPAN RB, 2023;
40. Juara 1 Lomba Unit Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah Terbaik Kota Semarang, 2023.
41. Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah, 2023.
42. Juara 1 Lomba Kelompok Budaya Kerja (KBK) Kota Semarang;
43. Juara 2 Poster Inovasi TENARS LARS DHP;
44. Juara 1 Lomba Badminton, Tennis Meja, dan Volley se-Kota Semarang dalam rangka HUT KORPRI ke-59;
45. Juara 1 KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Provinsi Jawa Tengah;
46. Juara 1 UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) Kota Semarang.

2.1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan & Peluang

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tabel berikut dengan menggunakan metode analisis SWOT.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
	1. PAD Kota Semarang cukup tinggi dan dapat dialokasikan untuk anggaran infrastruktur 2. Capaian UHC 100% 3. Seluruh Puskesmas Kota Semarang telah berstatus BLUD 4. Terdapat 39 Puskesmas di Kota Semarang 5. Terdapat Forum Kesehatan Kelurahan dan Kader di tingkat masyarakat yang aktif 6. Terdapat aplikasi Cakrawala milik Dinas Kesehatan Kota Semarang 7. Terdapat program Program Kampung Iklim di Kota Semarang dibawah DLH 8. Terdapat badan penanggulangan bencana di Kota Semarang 9. Adanya peta rawan bencana di Kota Semarang 10. Adanya peringatan dini bencana melalui media sosial 11. Adanya Rumah Pelita 12. Pengetahuan masyarakat cukup baik terkait pemenuhan gizi 13. Adanya Forum Kesehatan Kelurahan dan Kecamatan 14. Skrining status gizi Masyarakat sudah berjalan dengan baik 15. Sarana prasarana untuk pengukuran antropometri sudah tersedia 16. Kota Semarang sudah dinyatakan ODF 17. Terdapat sarana prasarana untuk peningkatan akses sanitasi yang memadai (sumber air berkualitas, dst) 18. Pasca pandemi COVID-19, tempat umum	1. Terdapat daerah pegunungan yang masih jauh dari akses pelayanan kesehatan 2. Masih terdapat beberapa daerah rawan banjir 3. Terdapat beberapa daerah endemis demam berdarah khususnya ketika musim hujan 4. Struktur lingkungan di Kota Semarang sangat bervariasi, mulai dari pesisir, dataran rendah, sampai dataran tinggi 5. Banyak pembukaan lahan hutan untuk permukiman warga 6. Kurangnya kepedulian Masyarakat terkait isu pemanasan global 7. Banyak wilayah rawan bencana di Kota Semarang 8. Belum semua Masyarakat paham terkait mitigasi bencana 9. Masih ada kemungkinan kesalahan pengukuran status gizi di masyarakat 10. Terdapat keluarga yang tidak bersedia diintervensi untuk perbaikan status gizi 11. Beberapa Masyarakat dengan status ekonomi rendah kesulitan untuk pemenuhan makanan bergizi 12. Isu sanitasi kurang menjadi perhatian di Masyarakat 13. Masyarakat belum terbiasa menerapkan PHBS di kehidupan sehari-hari 14. Kurangnya anggaran untuk kegiatan di level Masyarakat 15. Tidak ada kompensasi yang tinggi untuk Masyarakat

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
	sudah menyediakan sarana CTPS 19. Adanya Forum Kesehatan Kota, Kecamatan, dan Kelurahan di Kota Semarang 20. Banyak kebijakan dan program terkait kesehatan yang melibatkan lintas sektor di Kota Semarang 21. Banyak perguruan tinggi bidang kesehatan di Kota Semarang 22. Dinas dan OPD lain terbuka untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi 23. Adanya kebijakan Posyandu ILP untuk peningkatan skrining dan pemantauan kesehatan Masyarakat 24. Tersedia Puskesmas yang terakreditasi di seluruh wilayah Puskesmas 25. Adanya forum kesehatan kota, kecamatan dan kelurahan 26. Adanya kebijakan Posyandu ILP untuk peningkatan skrining dan pemantauan kesehatan Masyarakat 27. Tersedia Puskesmas yang terakreditasi di seluruh wilayah Puskesmas 28. Tersedia program pengendalian penyakit menular di Masyarakat misalnya PJN, ds 29. RS Rujukan untuk penyakit kejiwaan tersedia di Kota Semarang 30. Awareness mengenai isu kesehatan mental sudah mulai meningkat di Masyarakat 31. Forum Kesehatan Kota Semarang aktif sampai level kelurahan 32. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam forum kesehatan	16. Kurangnya monitoring untuk hasil penelitian dan pengembangan kesehatan 17. Wilayah lokus kegiatan masih terbatas 18. Tingginya angka morbiditas untuk penyakit tidak menular di Kota Semarang (Hipertensi, Diabetes, dst) 19. Belum semua Masyarakat aktif mengikuti skrining PTM 20. Tingginya angka morbiditas untuk penyakit menular di Kota Semarang (HIV/AIDS, Demam Berdarah, TB, dst) 21. Belum semua faktor risiko penyakit menular dapat dikendalikan, misalnya terkait cuaca untuk penyakit DB, perilaku Masyarakat untuk penyakit HIV/AIDS, dst 22. Adanya stigma terkait kesehatan mental sehingga Masyarakat ragu-ragu untuk berobat atau memeriksakan diri 23. Tidak semua Masyarakat memahami alur pelayanan kesehatan mental 24. Kurangnya kompensasi bagi kader kesehatan atau anggota forum kesehatan 25. Tidak semua anggota forum kesehatan memiliki kompetensi yang terstandar.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
	33. Forum kesehatan memiliki peran dan kontribusi yang penting untuk isu kesehatan di	
Peluang	Strategi Peluang Kekuatan	Strategi Peluang kelemahan
1. Adanya kebijakan ILP yang mengaktifkan kembali fungsi Pustu 2. Forum Kesehatan Kelurahan dapat bekerja sama untuk pengendalian penyakit berbasis lingkungan 3. Adanya kebijakan untuk pengendalian penyakit berbasis lingkungan 4. Terdapat transportasi publik yang memadai di Kota Semarang 5. Masih terdapat wilayah yang menjadi RTH 6. Lintas sektor mulai memperhatikan isu pemanasan global 7. Adanya Forum Kesehatan Kelurahan dan Kecamatan 8. Adanya peluang Kerjasama dan koordinasi dengan BPBD 9. Adanya kebijakan terkait penanganan masalah gizi di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 10. Kolaborasi lintas sektor untuk penanganan masalah gizi sudah berjalan dengan baik 11. Adanya kebijakan dan implementasi Posyandu ILP untuk meningkatkan skrining status gizi Masyarakat 12. Adanya peran lintas sektor untuk pemenuhan sanitasi Kota Semarang 13. Adanya kerjasama dengan instansi swasta untuk CSR terkait sarana sanitasi	1. Peningkatan akses dan kualitas sarana prasarana infrastruktu kesehatan. 2. Pengendalian penyakit dengan penguatan sistem pemantauan dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan di level masyarakat. 3. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan masyarakat untuk menyusun upaya adaptasi terhadap pemanasan global. 4. Meningkatkan peran lintas sektor mulai dari skrining, intervensi, dan pemantauan perbaikan status gizi masyarakat. 5. Mengimplementasikan program peningkatan gizi yang spesifik untuk daerah pesisir dan pegunungan 6. Koordinasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Semarang untuk peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. 7. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. 8. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak 9. Mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Forum Kesehatan Kota Semarang mulai dari level kelurahan dan kecamatan	1. Memperluas akses terhadap layanan kesehatan, memperkuat sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan meningkatkan perlindungan terhadap perolehan hak warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil. 3. Mengidentifikasi lintas sektor terkait untuk menyusun strategi adaptasi terhadap perubahan iklim 4. Mengedukasi masyarakat tentang dampak perubahan iklim dan cara mengurangi risiko kesehatan yang diakibatkannya Kerjasama dengan lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat, untuk mencegah, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan keadaan akibat bencana. 5. Identifikasi peran lintas sektor dalam upaya skrining, intervensi, dan pemantauan perbaikan status gizi masyarakat 6. Memetakan akar penyebab terkait akses sanitasi di Kota Semarang 7. Menyusun program prioritas untuk setiap lokus di Kota Semarang 8. Mengembangkan inovasi dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hasil penelitian 9. Mengidentifikasi akar penyebab dari penyakit

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
14. Adanya kesempatan untuk peningkatan kemandirian di level Masyarakat misalnya dengan Bank Sampah, dst 15. Perguruan tinggi memiliki dana dan membutuhkan wilayah untuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi 16. Selain perguruan tinggi juga terdapat NGO yang memiliki potensi untuk melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan di Kota Semarang 17. Kemudahan akses sosial media untuk sosialisasi tentang informasi kesehatan khususnya untuk promosi, pencegahan dan pengendalian PTM 18. Tersedia media sosial resmi milik dinas terkait dan pemerintah kota yang dapat menjadi acuan informasi bagi masyarakat 19. Kemudahan akses sosial media untuk sosialisasi tentang informasi kesehatan khususnya untuk promosi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular 20. Tersedia media sosial resmi milik dinas terkait dan pemerintah kota yang dapat menjadi acuan informasi bagi masyarakat 21. Skrining kesehatan mental dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Satu Sehat 22. Pelayanan kesehatan jiwa dapat dilakukan di FKTP dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan 23. Adanya institusi Pendidikan yang dapat membantu optimalisasi peran forum kesehatan	10. Mengoptimalkan fungsi forum kesehatan kota, kecamatan, dan kelurahan di Kota Semarang. 11. Advokasi terkait pengalokasian anggaran untuk kompensasi pada anggota forum kesehatan 12. Penguatan peran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor yaitu dengan memetakan perguruan tinggi dan NGO di Kota Semarang. 13. Menyusun media edukasi untuk dibagikan melalui sosial media terkait promosi, pencegahan, dan pengendalian penyakit tidak menular untuk semua kelompok usia 14. Standarisasi kompetensi anggota forum kesehatan dengan pelatihan dan upaya peningkatan kompetensi lainnya. 15. Mengedukasi masyarakat tentang isu kesehatan mental melalui media yang efektif	tidak menular (Hipertensi, DM, dst 10. Kerjasama lintas sektoral antara sektor kesehatan dan non-kesehatan untuk menerapkan pendekatan “kesehatan dalam semua kebijakan”, dan peduli terhadap ketersediaan serta kualitas air, sanitasi, nutrisi, pendidikan, lingkungan hidup, maupun sektor-sektor penting lainnya.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
Ancaman	Strategi Ancaman Kekuatan	Strategi Ancaman Kelemahan
1. Belum bisa terpenuhinya seluruh kebutuhan sarana prasarana di Pustu 2. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu 3. Perubahan iklim menjadi ancaman global 4. Tingginya penggunaan kendaraan di Kota Semarang 5. Banyak daerah rawan bencana akibat pemanasan global (banjir, dst) 6. Kejadian bencana semakin sulit diprediksi sebagai dampak isu pemanasan global dan perubahan iklim 7. Beberapa wilayah Kota Semarang merupakan daerah rawan bencana 8. Belum semua lapisan Masyarakat aktif mengikuti skrining status gizi 9. Penurunan status ekonomi Masyarakat dan penurunan daya beli makanan bergizi seimbang 10. Masih ada masyarakat dengan status ekonomi rendah yang belum dapat memenuhi sarana sanitasi di rumah 11. Ada kemungkinan timbulnya penyakit yang disebabkan dari masalah sanitasi 12. Semakin banyak kegiatan dan tugas yang harus dilakukan oleh kelompok Masyarakat untuk bidang kesehatan dan bidang strategis lainnya 13. Tidak semua Masyarakat terbuka untuk	1. Revitalisasi Pustu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 2. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan masyarakat untuk menyusun upaya adaptasi terhadap pemanasan global. 3. Mempersiapkan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dengan berkolaborasi dengan lintas sektor baik dari OPD dan juga organisasi di level masyarakat (Forum Kesehatan Kelurahan, Kecamatan, dst) untuk menyusun strategi mitigasi bencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat. 4. Meningkatkan peran lintas sektor untuk perbaikan status gizi masyarakat melalui skrining status gizi, mendapatkan intervensi perbaikan status gizi, serta dipantau perbaikan status gizinya. 5. Meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat dengan koordinasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Semarang. 6. Penguatan peran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dengan mengalokasikan lokus wilayah dan masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan mitra Kerjasama. 7. Meningkatkan upaya promosi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan	1. Membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah pesisir dan pegunungan 2. Menyediakan peralatan medis modern dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. 3. Mempromosikan praktik ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon 4. Optimalisasi peran lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan di level masyarakat 5. Mengembangkan sistem peringatan dini dan rencana evakuasi 6. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, seperti banjir di daerah pesisir dan tanah longsor 7. Mengidentifikasi sumber bantuan untuk menyelesaikan akar penyebab terkait masalah ekonomi yang menghambat akses sanitasi 8. Mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit tidak menular melalui media yang efektif 9. Melakukan monitoring secara berkala untuk pencegahan penyakit menular di level masyarakat. 10. Melakukan sosialisasi mengenai alur pelayanan kesehatan mental kepada masyarakat. 11. Meningkatkan kesadaran dan deteksi dini

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
menerima penelitian dan pengembangan bidang kesehatan di wilayahnya 14. Belum tentu permasalahan di Kota Semarang sesuai dengan skema atau topik untuk pendanaan yang tersedia di perguruan tinggi maupun LSM. 15. Tren usia penderita penyakit tidak menular tidak hanya usia dewasa atau lansia, tetapi mulai dari usia remaja 16. Tingginya Perilaku konsumsi makanan yang tidak sehat sejak usia dini 17. Rendahnya aktivitas fisik Masyarakat 18. Kelompok risiko untuk penyakit menular sangat luas dan memiliki karakteristik demografi yang bervariasi 19. Masih banyak Masyarakat yang belum menerapkan PHBS 20. Terdapat peningkatan kasus terkait kesehatan mental di Kota Semarang.	meningkatkan partisipasi masyarakat pada skrining PTM. 8. Mendorong pola makan sehat dan pemberian edukasi gizi kepada masyarakat 9. Optimalisasi peran masyarakat untuk perubahan perilaku terkait perilaku hidup bersih dan sehat 10. Melaksanakan kampanye kesehatan mental terpadu	terkait isu kesehatan mental.

b. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Kesehatan Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu: “Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Berkualitas, Serta Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Rumusan Permasalahan

“Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Berkualitas, Serta Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata pada wilayah-wilayah tertentu
		Masih terdapat kasus kematian ibu, bayi, dan balita serta kasus gizi buruk dan stunting pada balita
		Keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan perlu ditingkatkan
		Penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal
		Belum optimalnya promosi kesehatan kepada masyarakat

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata pada wilayah-wilayah tertentu

Masih tingginya masalah kesehatan dasar seperti gizi masyarakat tidak hanya stunting termasuk wasting, underweight, weight faltering, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular tuberculosis, HIV , penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus dan mortalitas yang dipengaruhi oleh :

a. Tingkat kesehatan : akses terhadap pelayanan kesehatan yaitu kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan serta kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan dan status kesehatan masyarakat;
b. Kualitas kesehatan lingkungan;
c. Gaya hidup serba instan : pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok dan minum alkohol;
d. Usia : kelompok usia lanjut memiliki resiko kematian yang lebih tinggi

2. Masih terdapat kasus kematian ibu, bayi dan balita serta kasus gizi buruk dan stunting pada balita

Tahun 2024 jumlah kematian ibu di Kota Semarang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 14 kasus kematian maternal. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Semarang pada tahun 2024, yaitu 80,46 per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, di mana terdapat 16 kasus kematian ibu dengan AKI sebesar 68,5 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebakan menurunnya jumlah kelahiran hidup, sehingga nilai AKI ikut mengalami kenaikan. Kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada masa nifas. Masa nifas adalah masa pemulihan setelah melahirkan berlangsung selama 4-6 minggu. 1 (satu) kasus kematian maternal terjadi pada masa kehamilan. 75 kematian ibu hamil terjadi pada usia ibu 20-35 tahun. Penyebab langsung kematian ibu hamil adalah syok sepsis, HELLP syndrome, cardiomyopati, pre eklampsi, atelectasis (TBC), DIC, multi orhgan failure, syok heamoragic dan syok hipovalemik.

Trend kematian bayi di Kota Semarang mengalami penurunan dari 142 menjadi 139 kasus kematian bayi. Peningkatan angka kematian bayi (AKB) dari 7,09 menjadi 7,99 per 1.000 kelahiran hidup akibat penurunan kelahiran hidup yang signifikan, dari 20.036 pada 2023 menjadi 17.401 pada 2024. Kematian lebih banyak terjadi pada bayi laki-laki (55%) dibanding perempuan (45%). Penyebab utama kematian bayi adalah prematuritas, asfiksia, dan infeksi.

Dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), jumlah kematian balita di Kota Semarang mengalami fluktuasi, dengan 147 kasus pada 2022, meningkat menjadi 164 pada 2023, dan di tahun 2024 menurun menjadi 158 kasus kematian balita. Meskipun terdapat penurunan jumlah kasus, Angka Kematian Balita (AKABA) justru meningkat dari 8,18 menjadi 9,08 pada 2024, sama halnya dengan kematian ibu dan bayi peningkatan angka kematian ibu, bayi dan balita disebabkan oleh penurunan secara signifikan jumlah kelahiran hidup.

Tahun 2024 jumlah kelahiran hidup di Kota Semarang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah kelahiran hidup di tahun 2023 sebanyak 20.047 sedangkan di tahun 2024 sebanyak 17.401 kelahiran hidup, hal ini disebabkan karena:

- Keberhasilan KB yang berdampak menurunnya kelahiran hidup;
- Dampak perubahan iklim (elnino) menyebabkan pre eklampsia, berat badan bayi lahir rendah, premature sehingga beresiko menyebabkan kematian bayi maupun ibu;
- Perubahan gaya hidup (perilaku) menyebabkan jumlah ibu hamil usia kurang dari 20 tahun meningkat hal ini merupakan bumil beresiko tinggi;
- Transisi demografi mengacu tingkat kelahiran dan kematian mempengaruhi komposisi penduduk. Angka mortalitas lebih tinggi dibandingkan angka fertilitas, maka akan berpengaruh negatif terhadap demografi.

Daycare Rumah Pelita adalah program inovasi penurunan stunting yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang dengan konsep bergerak bersama melalui perbaikan gizi dan pola asuh balita. Program daycare ini masih menjadi salahsatu program unggulan dalam penanganan balita stunting. Balita stunting khususnya yang berpenghasilan rendah dan berasal dari keluarga DTKS diberikan intervensi di Daycare setiap hari hingga mengalami perbaikan status gizi. Kegiatan yang dilakukan di Daycare diantaranya kegiatan bermain dan belajar yang dibimbing langsung oleh pengajar, kegiatan stimulasi perkembangan oleh bidan, kegiatan pemantauan status gizi oleh nutrisionis, pemberian makanan, kudapan, dan susu dengan total kalori 1400 kkal per hari, pemeriksaan dokter, pemeriksaan gigi anak, pemeriksaan fisioterapi, konseling psikolog, serta pelaksanaan kelas parenting. Berdasarkan Survey Nasional data stunting Kota Semarang mengalami trend penurunan secara signifikan, hasil riskesdas 2018 prevalensi stunting sebesar 29,7%, tahun 2019 berdasarkan SSGBI sebesar 26,6%, tahun 2021 [SSGI] sebesar 21,3%, tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 10,4% , berdasarkan data SKI 2023 prevalensi stunting Kota Semarang mengalami peningkatan 15,7% dan di tahun 2024 [SSGI] mengalami penurunan kembali sebesar 11,20%.

Hasil diagnostic reading balita stunting terdapat 10 penyebab stunting yaitu risiko stunting, pola asuh, lingkungan, ekonomi, asupan makan, riwayat hamil dan lahir, pendidikan, akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyakit infeksi dan mutasi,

3. Keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan perlu ditingkatkan

   Tahun 2024 jumlah kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) Kota Semarang mencapai 98.261 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp. 72.417.394.800,-. Prediksi kepesertaan di tahun 2025 meningkat menjadi 231.583 jiwa peserta UHC, hal ini meningkatkan kebutuhan anggaran pula prediksi kebutuhan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 91.770.483.100,- . Peningkatan ini diharapkan mampu meningkatkan peserta UHC yang mengakses layanan kesehatan baik di puskesmas maupun ke rumah sakit.

4. Penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal

   Kasus penderita TB semua tipe di Kota Semarang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 6.805 kasus dari tahun 2023 sebanyak 5.039, dengan proporsi lebih tinggi pada laki-laki (55%) dibanding perempuan (45%). Hal ini disebabkan dengan tingginya intensitas kontak laki-laki terhadap faktor risiko serta rendahnya kesadaran dalam menjaga kesehatan individu. Meskipun berbagai upaya

telah dilakukan, angka kesembuhan TB Paru BTA (+) selama tahun 2020–2024 belum memenuhi target nasional, di mana angka keberhasilan pengobatan pasien baru TB Paru BTA (+) masih berada di bawah standar 90% yang ditetapkan.

Eliminasi Tuberkulosis di Kota Semarang pada tahun 2028 ditargetkan dengan menurunkan insidensi Tuberkulosis (Incidence Rate/IR) dan angka kematian akibat Tuberkulosis (Mortality Rate/MR). Kedua indikator ini menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan eliminasi Tuberkulosis.

- Incidence Rate (IR) menggambarkan jumlah kasus Tuberkulosis baru yang ditemukan per 100.000 penduduk dalam satu tahun.

Mortality Rate (MR) menunjukkan jumlah kematian akibat Tuberkulosis per 100.000 penduduk dalam satu tahun.

Selama periode 2020-2024, tren insidensi Tuberkulosis di Kota Semarang bersifat fluktuatif, menunjukkan variasi dalam jumlah kasus yang ditemukan setiap tahunnya. Namun, penurunan terjadi dari tahun 2023 ke 2024, dari 307 per 100.000 penduduk pada tahun 2023 menjadi 200 per 100.000 penduduk pada tahun 2024, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk, terdapat 200 kasus baru Tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan. Penurunan ini menunjukkan dampak dari berbagai upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis, termasuk peningkatan deteksi kasus, penguatan sistem pelaporan, dan optimalisasi pengobatan.

IR tuberculosis Kota Semarang tahun 2024 sebesar 260 per 100.000 penduduk, hal ini menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 307 per 100.000 penduduk. Keberhasilan eliminasi Tuberkulosis tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah kasus baru (IR) tetapi juga dari menurunnya angka kematian akibat Tuberkulosis (MR). MR mencerminkan efektivitas sistem layanan kesehatan dalam menangani pasien Tuberkulosis, termasuk deteksi dini, akses pengobatan, serta dukungan sosial dan ekonomi bagi pasien.

Dari tahun 2023 ke 2024 tren MR di Kota Semarang juga mengalami penurunan. Penurunan IR dan MR ini menunjukkan adanya perbaikan dalam deteksi dini, pengobatan yang lebih efektif, serta intervensi lintas sektor yang lebih baik. Meskipun demikian, untuk mencapai target eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2028, diperlukan percepatan lebih lanjut agar IR dapat turun hingga ≤ 65 per 100.000 penduduk dan MR hingga ≤ 6 per 100.000 dalam empat tahun ke depan.

Penemuan penyakit kronis seperti TBC, HIV, DM dan Hypertensi dipengaruhi meningkatnya jumlah skrining yang dilakukan. semakian banyak skrining temuan semakin banyak. Jika dilihat absolut jumlah kasus TBC dan HIV mengalami penurunan. Penurunan pada kasus TBC terjadi karena terjadi karena peningkatan terapi pencegahan TBC untuk mereka yang beresiko tertular.

Untuk HIV penemuan sejak awal pada tahun tahun sebelumnya dengan pelayanan lydia dimari membantu menurunkan penularan pada mereka yang beresiko, sehingga kasus baru juga menurun. semakin cepat ditemukan dan diobati akan membantu penurunan kasus. Namun demikian penurunan jumlah kasus masih belum signifikan karena adanya banyak faktor diantaranya kualitas lingkungan, prilaku dan gaya hidup. Dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), jumlah kasus baru HIV

di Kota Semarang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2022 tercatat 689 kasus, meningkat menjadi 722 kasus pada 2023, lalu sedikit menurun menjadi 691 kasus di tahun 2024.

Hipertensi masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kota Semarang pada tahun 2024. Hipertensi (tekanan darah tinggi) terjadi ketika tekanan di pembuluh darah terlalu tinggi (140/90 mmHg atau lebih tinggi). Hal ini biasa terjadi tetapi bisa menjadi serius jika tidak diobati. Hal-hal yang meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi antara lain:

- Usia yang lebih tua
- Genetika
- Kelebihan berat badan atau obesitas
- Tidak aktif secara fisik
- Diet tinggi garam
- Minum terlalu banyak alkohol

Dalam tiga tahun terakhir, kasus hipertensi di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 209.910 kasus, kemudian meningkat tajam menjadi 332.537 kasus pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 341.084 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa hipertensi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan memerlukan perhatian khusus.

Intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak hipertensi dengan cara :

1. Modifikasi pola makan dengan mengurangi asupan garam <6gr per hari serta meningkatkan asupan sayur/buah;
2. Menyesuaikan berat badan ideal sesuai dengan analisa IMT (BB/TB2);
3. Mengagendakan aktivitas fisik seperti dengan latihan aerobik ringan selama 30 menit/hari atau 210 menit/minggu;
4. Berhenti merokok dan atau hindari asap rokok bagi yang tidak merokok;
5. Bagi penderita, rutin meminum obat hipertensi dan cek tekanan darah setiap bulan di Puskesmas atau Posbindu;
6. Mengedukasi dan mengajak anggota keluarga untuk menerapkan GERMAS dirumah;

Kasus penyakit tidak menular lainnya di Kota Semarang adalah kasus Diabetes Melitus (DM). Jumlah kasus ini mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, dari 55.075 kasus pada 2022 menjadi 48.119 pada 2023, dan 43.558 pada 2024.

Timbulnya masalah kesehatan baru, masalah mental health dan emerging infectious *disease* perlu mendapatkan perhatian. Kasus depresi, kecemasan, bunuh diri meningkat. Infeksi baru dan AMR (Resistansi Antimikroba) muncul, maka diperlukan penguatan sisten kesiapsiagaan kondisi luar biasa (KLB).

5. Belum optimalnya promosi kesehatan kepada masyarakat

Meningkatkan efektivitas promosi kesehatan kepada masyarakat agar mampu mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat secara berkelanjutan sangat diperlukan. Efektivitas promosi kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menekankan pada penyampaian pesan yang tepat, media yang sesuai, dan

keterlibatan aktif masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah melalui

- Pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
- Memanfaatkan media dan teknologi baik media tradisional seperti leaflet, poster, spanduk atau baliho, media eletronik berupa radio, televisi dan media digital seperti kampanye di media sosial, aplikasi kesehatan maupun video edukasi singkat;
- Pendekatan berbasis komunitas seperti mengaktifkan posyandu, posbindu PTM, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), membentuk kader kesehatan maupun melibatkan organisasi masyarakat, sekolah dan dunia usaha;
- Integrasi lintas sektoral

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala. Penekanan pada ketiga strategi tersebut merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. SDM yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Pembangunan manusia berpusat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, memampukan manusia (human capabilities) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar, termasuk kesehatan, serta menggunakan pendekatan siklus hidup. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dituangkan dalam Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dengan sasaran utama Kesehatan untuk Semua.

Sasaran utama pada prioritas nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Kesehatan Untuk Semua				
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,13 (2023)	74,43	75,4
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023)	2,12	2,10
3	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)a)	189 (2020)	122	77
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat	21,50 (2023)	18,8	14,2

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	pendek) pada balita (%)			
5	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	387 (2023)	329	190
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,42 (2024)	98,6	99

Arah kebijakan kesehatan pada RPJMN 2025-2029 adalah

1. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat, melalui (a) penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak; (b) pencegahan dan penurunan stunting, dengan meningkatkan cakupan dan kualitas serta integrasi intervensi kunci yang berfokus pada penguatan faktor determinan di masing-masing kelompok sasaran; (c) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; serta (d) penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis.
2. Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi diarahkan untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, dengan akses pada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam perbaikan gizi, melalui (a) pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; serta (b) penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi.
3. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan, melalui (a) penuntasan tuberkulosis, (b) eliminasi penyakit kusta dan schistosomiasis, (c) pengendalian penyakit menular lainnya terutama HIV/AIDs dan eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya seperti malaria (d) pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa, (e) pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar

bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik; serta (f) penyehatan lingkungan.

4. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui (a) penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara; (b) pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; serta (c) penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan;
5. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan, melalui (a) investasi pelayanan kesehatan primer; (b) pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses termasuk pengembangan layanan berbasis kompetensi terutama kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak; (c) produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, antara lain melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; (d) penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi peserta non aktif, penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan JKN, serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan; serta (e) penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan, termasuk peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan kesehatan.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Lingkup Kesehatan
Pencapaian Prioritas Nasional 4 di dukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat:

1. Memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan
3. membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan

gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang kesehatan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing.
2. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
4. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.
5. Menurunnya kemiskinan secara inklusif.
6. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat.

Dinas Kesehatan secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan dan Rehabilitasi. Tujuan ke 3 yaitu Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dan Sasaran 6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan dengan indikator Indeks Kesehatan.

c. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Renstra Kementerian Kesehatan periode 2025-2029 menjadi acuan strategis dalam pengembangan sistem kesehatan nasional. Dokumen ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan kesehatan yang kini dihadapi di Indonesia mulai dari ketimpangan akses layanan kesehatan, peningkatan penyakit tidak menular, isu stunting dan gizi, hingga kebutuhan akan sistem kesehatan yang tangguh, responsif, serta berbasis bukti dan teknologi.

d. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi dan Renstra Dinas Kesehatan Kota memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya merupakan dokumen turunan dari Renstra Kementerian Kesehatan dan RPJMD daerah masing-masing. Telaah terhadap kedua dokumen ini penting agar arah pembangunan kesehatan di tingkat kota tidak berjalan parsial, tetapi selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kesehatan . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Kesehatan Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Kesehatan Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembengan wilayah Kota Semarang berdasarkan Perturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang untuk kawasan kesehatan dijabarkan sebagai berikut:

a. Diperbolehkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan; dan
b. Diperbolehkan terbatas pembangunan kesehatan komersial dan jasa dalam rangka mendukung pelayanan umum; dan
c. Diwajibkan memiliki runag parkir yang mencukupi.

Program Utama	Lokasi	WAKTU PELAKASANAAN													Sumber dana
		PJM-1	PJM-2		PJM-3					PJM-4					
		2011-2015	2016-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kawasan Kesehatan															
Peningkatan kualitas kawasan kesehatan															APBD Swasta

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kesehatan Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Kesehatan tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Kesehatan Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Dinas Kesehatan tidak dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Kesehatan adalah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Tabel 2.11 Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran penerapan pola hidup sehat	1. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Tabel 2.12 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
	Tanpa Kemiskinan							
1.	Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	100%	100%	100%	100%	100%	98	Meningkatkan jumlah kepesertaan JK
2.	Cakupan pertolongan persalinan di faskes	100%	100%	100%	100%	100%		Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan di faskes
3.	Cakupan imunisasi dasar lengkap	95%	96%	97%	98%	99%		
	Tanpa kelaparan							
1	Prevalensi balita gizi buruk	1,2	1	0,8	0,6	0,4		Penurunan prevalensi stunting
2	Prevelensi stunting (pendek dan sangat [pendek) pada anak dibawah dua tahun/ baduta	10,64	8,88	7,72	6,56	5,4	7,6	Penurunan prevalensi stunting
3	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting TB/U pada anak dibawah dua tahun	10,64	8,88	7,72	6,56	5,4		Penurunan prevalensi stunting
4	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (gizi kurang dan obesitas)	7	6,5	6	5	4		Penurunan prevalensi stunting

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
5	Prevalensi anemia pada ibu hamil	7	6,8	6,6	6,4	6		Menurunkan kasus anemia pada ibu hamil
6	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	70	73	75	77	80		Meningkatkan cakupan ASI Ekslusif
	Kehidupan sehat dan sejahtera							
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%		Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh nakes
2	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%		Meningkatkan cakupan persalinan
3	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7,8	7,77	7,75	7,66	7,62		Menurunkan kematian bayi
4	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	8,9	8,85	8,8	8,75	8,6		Menurunkan kematian balita
5	Persentase kelurahan UCI	100	100	100	100	100		Meningkatkan UCI
6	IR HIV per 1000	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18		Menurunkan jumlah kasus HIV
7	IR Tuberculosis per 1000 penduduk							Menurunkan jumlah penderita
8	Jumlah kasus malaria/ Annual Paracite Incidence (API)	<1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	Menurunkan jumlah kejadian kasus malaia
9	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan :							
	a) Jumlah kasus kronis filariasis (Proxy)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	Menurunkan kasus filariasis
	b) Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk (Proxy)	<1	<1	<1	<1	<1		Menurunkan jumlah penderita kusta
10	Persentase merokok pada penduduk umur 10-21 tahun	11	10,5	10	9,5	9		Menurunkan potensi jumlah perokok

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
11	persentase hipertensi dalam pengendalian	33	35	37	39	41		Menurunkan potensi jumlah penderita
12	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	25	25	25	25	25		Menurunkan kasus obesitas
13	Persentase uskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	100%	100%	100%	100%	100%		Meningkatkan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan jiwa
14	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%		Meningkatkan pelayanan kefarmasian
15	Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	100%	100%	100%	100%	100%		Memingkatkan kelurahan STBM

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

g. Telaahan Dokumen Lainnya

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahuan 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

   Layanan kesehatan di Kota Semarang masih belum merata ke seluruh wilayah. Beberapa daerah terutama di pinggiran kota seperti wilayah timur, barat, dan kawasan yang berdekatan dengan pantai belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2017, Kota Semarang sebagai pusat utama Kawasan Kedungsepur memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan kesehatan bertaraf internasional, nasional, dan regional.

2. Keikutsertaan BPJS

   Meskipun tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang telah mencapai 100%, kualitas dan pemerataan layanan kesehatan tetap perlu ditingkatkan agar seluruh peserta mendapatkan akses yang setara dan bermutu.

3. Kesehatan Ibu dan Anak

   Angka kematian neonatal, kematian ibu, dan kematian balita di Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2024. Sementara itu,

kasus stunting dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan tren peningkatan yang terlihat pada tahun 2023. Meskipun upaya pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak telah dilakukan melalui puskesmas dan posyandu hasilnya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang gizi, serta kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan.

4. Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular

   Penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, kusta, hepatitis B, dan malaria masih menunjukkan angka kejadian yang tinggi di Kota Semarang. Pada tahun 2024, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis mencapai 103,70%, namun tingkat keberhasilan pengobatan hanya 81,50%, menunjukkan adanya kesenjangan antara kasus yang teridentifikasi dan pasien yang sembuh. Sementara itu, kasus penyakit tidak menular terus meningkat, terutama hipertensi dan diabetes, disertai penurunan partisipasi perempuan dalam deteksi dini kanker serviks dan payudara pada 2023. Selain itu, pada 2024 tercatat 4.233 orang dengan gangguan jiwa berat (skizofrenia dan psikotik akut) yang seluruhnya telah mendapat pelayanan di puskesmas. Peningkatan ancaman penyakit tidak menular ini diperparah oleh perubahan demografi yang didominasi usia produktif dan lansia serta pola hidup kurang sehat, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan promosi kesehatan yang lebih intensif.

5. Promosi Kesehatan kepada masyarakat

   Dalam periode Renstra 2025–2029, Dinas Kesehatan Kota Semarang menempatkan promosi kesehatan sebagai salah satu strategi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya. Upaya promosi kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum.

   Kegiatan promosi kesehatan dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:
   1. Penyuluhan dan edukasi kesehatan di Posyandu, sekolah, puskesmas, dan komunitas lokal.
   2. Kampanye kesehatan melalui media cetak, elektronik, dan digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
   3. Pemberdayaan masyarakat melalui kader kesehatan, kelompok PKK, karang taruna, serta tokoh masyarakat yang berperan sebagai agen perubahan.
   4. Integrasi kearifan lokal dan budaya masyarakat Semarang, agar pesan-pesan kesehatan lebih mudah diterima dan dipraktikkan.
   5. Kolaborasi lintas sektor dengan sekolah, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan media massa.

   Dinas Kesehatan Kota Semarang menargetkan tercapainya masyarakat yang semakin peduli dan aktif menjaga kesehatan, menurunnya angka kejadian penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Promosi kesehatan juga diharapkan dapat menjadi pondasi kuat dalam mendukung pencapaian indikator pembangunan kesehatan daerah, termasuk upaya penurunan stunting, peningkatan gizi, dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap krisis kesehatan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Semarang, sehingga perlu upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui langkah-langkah strategis yang selaras dengan tujuan pembangunan Kota Semarang dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan

Tabel 2.13 Isu Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kewenangan Dinas Kesehatan sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah : 1. Upaya kesehatan 2. Sumber daya manusia kesehatan 3. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran penerapan pola hidup sehat	Isu global dari WHO : Perubahan iklim dan kesehatan	Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan responsiveness sistem kesehatan di seluruh wilayah.	Peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan - Kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	akses terhadap - pelayanan kesehatan belum merata pada wilayah-wilayah tertentu
Upaya kesehatan : - Memiliki kewenangan untuk pengelolaan UKP dan UKM - Cakupan kepesertaan UHC Kota Semarang telah 100% - Dukungan dana APBD dan APBD I serta APBN - Memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas yang rata-rata telah melebihi 65% standar ASPAK			Penyakit menular baru dan ketahanan antimikroba	Kesehatan untuk semua : 1. usia harapan hidup (tahun) target tahun 2029 : 75,4	kesehatan ibu dan anak	masih terdapat kasus kematian ibu, bayi, dan balita serta kasus gizi buruk dan stunting pada balita

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- Adanya media promosi kesehatan yang mendorong perubahan perilaku - Teknologi dan informasi yang terupdate - Memiliki data dan peta resiko kesehatan -						
Potensi sumber daya manusia kesehatan : Dinas Kesehatan berkewenangan untuk memanfaatkan, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya kesehatan termasuk SDMK berupa: - Fasilitas pelayanan kesehatan : puskesmas, puskesmas pembantu, laboratorium kesehatan, rumah sakit yang telah BLUD - Tahun 2025 38 puskesmas telah terakreditasi paripurna - Tenaga kesehatan dan tenaga medis yang berkompeten		Penanganan penyakit menular dan tidak menular	Kesetaraan akses kesehatan	2. Kesehatan ibu dan anak a. Angka kematian ibu per 100.000 KH. Target tahun 2029 : 77 b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita. Target tahun 2029 : 11%		keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan perlu di tingkatkan

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi terkait dengan Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman : - Memiliki kewenangan untuk penerbitan ijin apotek, toko obat - Memiliki kewenangan untuk penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga - Pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga			Penyakit menular	3. Insiden tuberkulosis per 100.000 penduduk. Target tahun 2029 : 190		penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal
Potensi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan : - Adanya Forum Kesehatan Kelurahan dan Kader di tingkat masyarakat yang aktif - Adanya kebijakan posyandu ILP untuk peningkatan skrining dan pemantauan kesehatan masyarakat - Program GERMAS dilaksanakan secara kontinue - Memperkuat kemitraan dan kolaborasi lintas			Digitalisasi kesehatan	4. Cakupan kepesertaan jaminan . kesehatan nasional. Target tahun 2029 : 98%		belum optimalnya promosi kesehaan kepada masyarakat

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
sektor						
Memiliki kurang lebih 108 inovasi yang digunakan untuk mendukung program kegiatan			Sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Kesehatan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang kesehatan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Kesehatan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan"

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit;
2. Meningkatnya pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran dan pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat;
3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Kesehatan;
4. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro;
5. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro;
6. Meningkatnya mutu pelayanan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan	Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan		Angka harapan hidup	Tahun	78,38	78,52	78,67	78,82	78,96	79,30	Dinas Kesehatan, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dan RSUD Mijen
		Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit	Jumlah kematian ibu	Orang	13	13	13	12	12	12	Dinas Kesehatan
			Angka kematian balita	Per 1000 kelahiran hidup	9,02	8,97	8,91	8,85	8,79	8,74	Dinas Kesehatan
			Persentase penurunan kasus stunting EPPBGM	Persen	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	Dinas Kesehatan
			Angka populasi bebas penyakit menular	Persen	71	72	78	81	83	90	Dinas Kesehatan
			Angka populasi bebas penyakit tidak menular	Persen	50	52	54	56	58	60	Dinas Kesehatan
			Persentase fasilitas	Persen	40	60	70	80	90	100	Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kesehatan sesuai standar								
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	Persen	6,25	6,29	6,33	6,37	6,41	6,45	Dinas Kesehatan
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Persen	80	82	84	86	88	90	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran dan pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan aktivitas fisik	Persen	1,13	10,17	20,34	24,86	29,38	39,55	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Angka	80,45	81,5	82,25	83,3	84,32	85,03	Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Kesehatan	Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan								
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Angka	95,50	95,6	95,7	95,8	95,9	96	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro	Net death rate (NDR) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Permil	28,05	27,5	27,05	26,5	26,05	25	RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro	Angka	79,87	79,9	79,93	79,95	79,97	79,87	RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
			Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro	Angka	88,6	88,7	88,8	88,9	89	88,6	RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
		Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit	*Net death rate* (NDR) RSUD Mijen	Permil	35	33	30	28	26	24	RSUD Mijen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Umum Daerah (RSUD)									

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Kesehatan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Kesehatan dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Tahapan Strategi Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Penguatan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan	Pemantapan pencapaian program yang telah diperkuat di Dinas Kesehatan	Pengembangan dengan memperluas jangkauan dan kualitas program promotif preventif Kesehatan	Peningkatan daya saing berfokus pada mendorong inovasi menjadi rujukan/role model dan layanan kesehatan berbasis teknologi dan berkolaborasi sektor swasta Dinas Kesehatan	kemandirian/ keberlanjutan untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan sistem kesehatan berkelanjutan di Dinas Kesehatan

3.2.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Kesehatan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Kesehatan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Kesehatan

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan, diukur melalui Indeks Kesehatan	Penguatan layanan kesehatan primer (Puskesmas) berbasis keluarga dan masyarakat.	Arah kebijakan 1.1 Penguatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak berbasis siklus hidup	
			Arah kebijakan 1.2 Penguatan Gizi Masyarakat	
			Arah kebijakan 1.3 Penguatan Intervensi Lingkungan Sehat	
		Peningkatan cakupan imunisasi dan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa.	Arah kebijakan 2.1 Pengendalian penyakit menular berbasis pemetaan resiko kesehatan dan prioritas intervensi wilayah	
			Arah kebijakan 2.2 Pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik berbasis pemetaan resiko kesehatan dan prioritas intervensi wilayah	
		Pengembangan program rehabilitasi terpadu bagi penyandang disabilitas dan lansia.	Arah kebijakan 2.3 Pengendalian penyakit tidak menular berbasis pemetaan resiko kesehatan dan	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			prioritas intervensi wilayah	
		Modernisasi fasilitas kesehatan dan sistem rujukan rumah sakit berbasis digital.	Arah kebijakan 3.1 Penguatan layanan primer berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan sistem rujukan yang efisien	
			Arah kebijakan 3.2 Penguatan layanan kesehatan lanjutan	
			Arah kebijakan 3.3 Peningkatan ketersediaan dan akses obat vaksin, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau	
			Arah kebijakan 3.4 Pengembangan sistem informasi dan teknologi kesehatan yang terpadu berbasis digital	
			Arah kebijakan 3.5 Penguatan Pengelolaan Pendanaan [pembiayaan] Kesehatan	
		Penambahan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah kurang terlayani.	Arah kebijakan 4.1 Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan SDM kesehatan berbasis analisis situasi dan beban kerja serta peningkatan kualitas melalui diklat dan pengembangan profesional berkelanjutan	
			Arah kebijakan 4.2 Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan pangan	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			industri rumah tangga	
			Arah kebijakan 5.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	
			Arah kebijakan 6.1 peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pomotif dan preventif serta memperkuat kemitraan lintas sektor dan lintas program	
			Arah kebijakan 7.1 penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	
			Arah kebijakan 7.2 Penguatan tata kelola kepegawaian yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Kesehatan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan	Tujuan1: Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan				Angka Harapan Hidup		Kepala Dinas Kesehatan
		Sasaran 1: Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit			Jumlah Kematian Ibu		Kepala Dinas Kesehatan
					Angka kematian balita		Kepala Dinas Kesehatan
					Persentase penurunan kasus stunting EPPBGM		Kepala Dinas Kesehatan
					Angka populasi bebas penyakit menular		Kepala Dinas Kesehatan
					Angka populasi bebas penyakit tidak menular		Kepala Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar		Kepala Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional		Kepala Dinas Kesehatan
					Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi		Kepala Dinas Kesehatan
					Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		Kepala Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita		Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining *pre-eclampsia*	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita		Angka Kematian Bayi	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita		Prevalensi wasting balita	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita		Persentase Ibu Hamil KEK	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
				Tercapainya cakupan layanan kesehatan ibu dan anak	Persentase ANC 6 kali	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak
				Tercapainya cakupan layanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah kematian bayi	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Sub Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Staf KIA
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Staf KIA
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Staf KIA
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Staf KIA
				Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Staf KIA
				Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Staf KIA
				Tercapainya cakupan intervensi gizi pada balita dan ibu hamil dengan KEK	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan tata laksana	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
				Tercapainya cakupan intervensi gizi pada balita dan ibu hamil dengan KEK	Persentase Ibu hamil KEK atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Staf PMG
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Staf PMG
			Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat		Indeks kesehatan lingkungan	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat		Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
				Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kualitas air minum memenuhi syarat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
				Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Jumlah KLB Keracunan Pangan	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
				Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kualitas udara di tempat fasilitas umum dan permukiman	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
				Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai	Persentase kelurahan dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				standar dan kebutuhan masyarakat		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan KK berperilaku cuci tangan pakai sabun	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
				Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan air minum dan pangan	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
				Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan sampah	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
				Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan limbah cair	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Staf Kesling & Promkes
				Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Staf Kesling & Promkes
			Meningkatnya penanganan kesehatan bagi lanjut usia		Persentase lanjut usia yang mandiri	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya pemantauan status kesehatan dan faktor risiko PTM pada lansia	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Staf PMG
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Staf PMG
			Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		Angka *Incident Rate* (IR) HIV	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		*Treatment Success Rate* (TSR) TBC	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
				Terselenggaranya upaya deteksi dini dan akses pengobatan penyakit menular sesuai target	Jumlah ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya upaya deteksi dini dan akses pengobatan penyakit menular sesuai target	Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan *(Enrollment* TBC)	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Staf P2ML
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Staf P2ML
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Staf P2ML
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Staf P2ML
				Terselenggaranya pemetaan wilayah prioritas intervensi untuk pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	Angka *Incident Rate* (IR) DBD	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
				Terselenggaranya pemetaan wilayah prioritas intervensi untuk pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	AP Malaria	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Staf P2TVZ
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Staf P2TVZ
				Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase hipertensi dalam pengendalian	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
				Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase diabetes melitus dalam pengendalian	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
				Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Cakupan imunisasi bayi lengkap	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
				Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
				Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Prevalensi obesitas	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase depresi yang mendapatkan layanan kesehatan	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Staf P2TM
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Staf P2TM
				Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Staf P2TM
				Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Staf P2TM
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Staf P2TM
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Staf P2TM
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Staf P2TM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Staf P2TM
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Staf P2TM
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Staf P2TM
				Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Staf P2TM
			Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan		Persentase fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terakreditasi minimal paripurna	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
			Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
				Terpenuhinya penyediaan fasilitas pelayan kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat SPA sesuai standar	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
				Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Staf PKPT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Staf PKPT
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Staf PKPT
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Staf PKPT
				Tercapainya respons time pelayanan gawat darurat sesuai standar	Persentase *respon time* pelayanan gawat darurat sesuai standar	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koor Pelayanan Kesehatan Rujukan
				Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Staf Yankes Rujukan
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koor Pelayanan Kesehatan Rujukan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Staf Yankes Rujukan
				Terjaminnya mutu pelayanan UKM dan UKP	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
				Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Staf PKPT
				Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Staf PKPT
				Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Staf PKPT Staf Puskesmas Poncol Staf Puskesmas Miroto Staf Puskesmas Bandarharjo Staf Puskesmas Bululor Staf Puskesmas Halmahera Staf Puskesmas Bugangan Staf Puskesmas Karangdoro Staf Puskesmas Pandanaran Staf Puskesmas Lamper Tengah Staf Puskesmas Karangayu Staf Puskesmas Lebdosari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
							Staf Puskesmas Manyaran Staf Puskesmas Krobokan Staf Puskesmas Ngemplak Simongan Staf Puskesmas Gayamsari Staf Puskesmas Candilama Staf Puskesmas Kagok Staf Puskesmas Pegandan Staf Puskesmas Genuk Staf Puskesmas Bangetayu Staf Puskesmas Tlogosari Wetan Staf Puskesmas Tlogosari Kulon Staf Puskesmas Kedungmundu Staf Puskesmas Rowosari Staf Puskesmas Ngesrep Staf Puskesmas Padangsari Staf Puskesmas Srondol Staf Puskesmas Pudak Payung Staf Puskesmas Gunungpati Staf Puskesmas Mijen Staf Puskesmas Karang Malang Staf Puskesmas Tambakaji Staf Puskesmas Purwoyoso Staf Puskesmas Ngaliyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
							Staf Puskesmas Mangkang Staf Puskesmas Karanganyar Staf Puskesmas Sekaran Staf Puskesmas Bulusan Staf Puskesmas Plamongansari Staf Puskesmas Kaligawe
				Meningkatnya fasyankes yang mencapai target indikator nasional mutu pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas yang mencapai target indikator nasional mutu	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Staf PKPT
				Tercapainya cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase kenaikan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Jaminan Kesehatan
				Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Staf Yankes Jamkes
			Meningkatnya ketersediaan obat PKD, obat program dan vaksin serta perbekalan di fasilitas pelayanan kesehatan		Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya efektivitas pengadaan dan distribusi obat, bahan habis pakai, vaksin ke fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD instalasi Farmasi
				Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kasubag TU Instalasi Farmasi dan Staf UPTD Instalasi Farmasi
				Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kasubag TU Instalasi Farmasi dan Staf UPTD Instalasi Farmasi
				Meningkatnya kegiatan operasioanal Instalasi Farmasi sesuai standar	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD instalasi Farmasi
				Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kasubag TU Instalasi Farmasi dan Staf UPTD Instalasi Farmasi
			Meningkatnya kualitas manajemen informasi kesehatan		Proporsi fasilitas layanan kesehatan yang terintegrasi SIKN	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
				Meningkatnya integrasi data kesehatan daerah melalui sistem informasi yang terkoneksi dengan Sistem Informasi	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Sub Koordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Kesehatan Nasional (SIKN)			
				Meningkatnya integrasi data kesehatan daerah melalui sistem informasi yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Sub Koordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Staf Infokes
				Terlaksananya pengawasan terhadap Rumah Sakit Kelas C dan D	Persentase RS Kelas C dan D yang telah diawasi	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan
				Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Staf Infokes
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan		Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
				Tercapainya pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kompetensi dan kebutuhan layanan UKP dan UKM	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tercapainya pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kompetensi dan kebutuhan layanan UKP dan UKM	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Staf SDMK
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Staf SDMK
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Staf SDMK
				Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Jumlah workshop/seminar/bimtek peningkatan mutu yang dilaksanakan	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Staf SDMK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan		Persentase IRTP yang memenuhi ketentuan	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
			Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan		Proporsi apotek, toko obat, usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
				Meningkatnya jumlah IRT Pangan yang memperoleh SPP-IRT dan memenuhi komitmen keamanan pangan sesuai standar yang berlaku	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Staf Farmamin
				Meningkatnya kualitas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan post market pada produk makanan minuman IRTP	Persentase temuan hasil pemeriksaan *post market* yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
				Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah	Staf Farmamin

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
				Tercapainya kepatuhan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, serta UMOT terhadap ketentuan perizinan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT yang ditindaklanjuti	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Staf Farmamin
		Sasaran 2: Meningkatnya pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat			Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan aktivitas fisik		Kepala Dinas Kesehatan
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
				Terjalinnya kemitraan lintas sektor dalam	Persentase kemitraan/kerja sama lintas sektor dan atau	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				mendukung program kesehatan masyarakat	mitra non-pemerintah yang terjalin dan aktif	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Staf Kesling & Promkes
				Terlaksananya kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di tingkat daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye GERMAS	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
				Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Staf Kesling & Promkes
				Meningkatnya jumlah Posyandu yang aktif memberikan layanan kesehatan sesuai siklus hidup	Cakupan posyandu aktif siklus hidup yang aktif	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Staf PMG
		Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kesehatan			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan		Kepala Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan		Kepala Dinas Kesehatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Poncol
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Miroto
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bandarharjo
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bulu Lor
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Halmahera

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bugangan
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Karangdoro
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandanaran
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Lamper Tengah
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Karangayu
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Lebdosari
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Manyaran
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Krobokan
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ngemplak Simongan
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gayamsari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Candilama
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kagok
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pegandan
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Genuk
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bangetayu
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tlogosari Wetan
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tlogosari Kulon
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kedungmundu
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Rowosari
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ngesrep

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Padangsari
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Srondol
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pudak Payung
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gunungpati
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mijen
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Karangmalang
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tambakaji
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Purwoyoso
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ngaliyan
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mangkang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Karanganyar
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sekaran
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bulusan
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Plamongansari
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kaligawe
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Laboratorium Kesehatan
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan & Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan & Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan & Evaluasi
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan & Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Staf Perencanaan & Evaluasi
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan & Evaluasi
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dinas Kesehatan	1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan & Evaluasi
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Keuangan dan BMD
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Keuangan dan BMD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Keuangan dan BMD
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan kepegawaian Dinas Kesehatan yang memenuhi prosedur dan sesuai standar	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umpeg

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umpeg
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staf Umpeg
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Staf Umpeg
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umpeg
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umpeg
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Staf Umpeg
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umpeg
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umpeg

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umpeg
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umpeg
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf Umpeg
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan yang selesai ditindaklanjuti	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Staf Umpeg
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umpeg
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umpeg

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan sesuai ketentuan	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Umpeg
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umpeg
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umpeg
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umpeg
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf Umpeg
		Sasaran 4: Meningkatnya mutu pelayanan Rumah			*Net Death Rate (NDR)* RSUD Mijen		Kepala Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen					
			Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen		Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap Penduduk Kota Semarang	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Direktur RSUD Mijen
			Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Direktur RSUD Mijen
				Tersedianya sarana, prasarana, obat, dan bahan penunjang pelayanan rumah sakit	persentase ketersediaan sarana, prasarana dan bahan penunjang di RSUD Mijen	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Staf Pelayanan Penunjang
				Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Staf Pelayanan Penunjang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tercapainya mutu pelayanan rumah sakit sesuai indikator standar pelayanan minimal	persentase capaian SPM di Rumah Sakit Mijen	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
				Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Staf Pelayanan Medik dan Keperawatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD Mijen		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Mijen yang berkualitas	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Direktur RSUD Mijen
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD Mijen		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD Mijen	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Direktur RSUD Mijen
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Mijen beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja RSUD Mijen yang sesuai peraturan perundangan	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Tata Usaha
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Tata Usaha
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Tata Usaha
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan RSUD Mijen yang sesuai peraturan perundangan	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Tata Usaha

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				RSUD Mijen yang sesuai peraturan perundangan			
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Tata Usaha
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Tata Usaha
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Tata Usaha
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RSUD Mijen	Persentase pelayanan kepegawaian RSUD Mijen yang memenuhi prosedur dan sesuai standar	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Tata Usaha
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Tata Usaha
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor RSUD Mijen	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Tata Usaha

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				pelaksanaan kegiatan RSUD Mijen			
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Tata Usaha
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD Mijen	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD Mijen	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Tata Usaha
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Tata Usaha
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf Tata Usaha
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada RSUD Mijen	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada RSUD Mijen yang selesai ditindaklanjuti	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Tata Usaha
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Tata Usaha
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Tata Usaha
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kasubag Tata Usaha

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD Mijen	sarpras kantor RSUD Mijen sesuai ketentuan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Tata Usaha
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Tata Usaha
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Tata Usaha
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Tata Usaha
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf Tata Usaha
				Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD Mijen	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kasubag Tata Usaha

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Staf Tata Usaha
		Sasaran 5: Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro			*Net Death Rate* (NDR) RSUD K.R.M.T Wongosnegoro		Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
			Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang sesuai standar di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Wakil Direktur Pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegro
				Terwujudnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase pemenuhan alat kesehatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro untuk upaya kesehatan perorangan sesuai rencana pengadaannya	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Katimja Penunjang Medis
			Meningkatnya efektivitas pemangfaatan sarana prasarana RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		Persentase tingkat penggunaan sarana prasarana sesuai standar	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
				Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar pelayanan	Persentase kesesuaian sarana prasarana yang digunakan dengan standar pelayanan kesehatan	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bagian Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
		Sasaran 6: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan BLUD RSUD K.R.M.T Wongsonegoro			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
		Sasaran 6: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan BLUD RSUD K.R.M.T Wongsonegoro			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang berkualitas	1.02.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	1.02.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase temuan keuangan yang berhasil ditindaklanjuti	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bagian Keuangan
					Rasio Kas RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sub Bagian Akuntansi, Penyusunan Anggaran, dan BMD
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sub Koordinator Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang sesuai peraturan perundangan	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pelayanan dan pemasaran RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase kinerja pemasaran dan informasi	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Informasi
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka	Nilai layanan kepegawaian RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bagian Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro			
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bagian Umum
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bagian Umum
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang selesai ditindaklanjuti	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bagian Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor RSUD K.R.M.T Wongsonegoro sesuai ketentuan	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bagian Umum
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
			Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		Persentase ketercapaian kinerja pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	1.02.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Wakil Direktur Pelayanan
			Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		Persentase ketercapai Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	1.02.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Wakil Direktur Pelayanan
				Meningkatnya pelayanan medis dan penunjang medis yang berkualitas	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ketua Tim Kerja Pelayanan Medis
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ketua Tim Kerja Penunjang Medis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya pelayanan keperawatan, kebidanan dan penunjang non medis yang berkualitas	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ketua Tim Kerja Keperawatan dan Kebidanan
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ketua Tim Kerja Penunjang Non Medis

Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu

1. Penguatan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan
2. Menekankan kematian ibu bayi dan balita
3. Pemberian makanan tambahan bagi keluarga miskin rawan stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan baduta guna menciptakan generasi SDM mendatang yang berdaya guna
4. Pemerataan layanan kesehatan
5. Pemerataan akses fasilitas kesehatan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas
6. Perluasan program kepesertaan jaminan sosial melaluai BPJS Kesehatan
7. Mendorong industri pangan rumah tangan yang aman;
8. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, tata laksana kasus, serta peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat.

Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkulitas dan berkesinmabungan melalui pengendalian penyaktit	Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten/ kota Sub kegiatan ': - Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil - Pengelolaan pelayanan lesehatan ibu bersalin - Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Pengelolaan pelayana kesehatan balita - Pengelolaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut - Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV - Pengeloalan pelayanan kesehatan gizi masyarakat - Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	- Penguatan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan - Menekankan kematian ibu bayi dan balita - Pemberian makanan tambahan bagi keluarga miskin rawan stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan baduta guna menciptakan generasi SDM mendatang yang berdaya guna - Pemerataan layanan kesehatan - Pemerataan akses fasilitas kesehatan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas - Perluasan program kepesertaan jaminan sosial melaluai BPJS Kesehatan - Mendorong industri pangan rumah tangan yang aman; - Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, tata laksana kasus, serta peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat.

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tujuan1: Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan	Angka Harapan Hidup	Tahun	78.24	78.52	968.269.509.776	78.67	1.076.342.428.930	78.82	1.123.380.793.778	78.96	1.132.021.073.174	79.30	1.152.401.702.553	Kepala Dinas Kesehatan
Sasaran 1: Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah kematian	14	13	169.204.134.818	13	187.105.267.361	12	194.895.809.305	12	196.325.510.829	12	199.699.860.543	Kepala Dinas Kesehatan
	Angka kematian balita	per 1000 KH	9.1	8,97		8,91		8,85		8,79		8,74		Kepala Dinas Kesehatan
	Persentase penurunan kasus stunting EPPBGM	persen	0,7%	0,6%		0,5%		0,4%		0,3%		0,2%		Kepala Dinas Kesehatan
	Angka populasi bebas penyakit menular	angka	71	72		78		81		83		90		Kepala Dinas Kesehatan
	Angka populasi bebas penyakit tidak menular	angka	50	52		54		81		83		90		Kepala Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	persen	60%	60%		70%		80%		90%		100%		Kepala Dinas Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kesehatan nasional													
	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	rasio	7,57	6,29		6,33		6,37		6,41		6,45		Kepala Dinas Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	80%	82%		84%		86%		88%		90%		Kepala Dinas Kesehatan
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					3.706.719.000		4.098.879.000		4.269.550.000		4.300.875.000		4.374.799.000	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining *pre-eclampsia*	persen	79%	83%		85%		88%		90%		100%		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	Angka Kematian Bayi	angka	7,99	7,87		7,82		7,76		7,7		7,64		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	Prevalensi wasting balita	persen	4,80%	4,70%		4,6		4,5		4,4		4,3		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Ibu Hamil KEK	persen	16%	14%		13%		12%		11%		10%		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					688.465.000		761.305.000		793.008.000		798.829.000		812.561.000	Sub Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak
Tercapainya cakupan layanan kesehatan ibu dan anak	Persentase ANC 6 kali	Persen	100%	100%	688.465.000	100%	761.305.000	100%	793.008.000	100%	798.829.000	100%	812.561.000	Sub Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak
	Jumlah kematian bayi	Jumlah	139	127		120		112		104		95		Sub Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					25.869.000		28.606.000		29.798.000		30.017.000		30.533.000	Staf KIA
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18,192	18,293	25.869.000	18,476	28.606.000	18,661	29.798.000	18,847	30.017.000	19,033	30.533.000	Staf KIA
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					8.648.000		9.563.000		9.962.000		10.036.000		10.209.000	Staf KIA
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17,236	17,536	8.648.000	17,711	9.563.000	18,067	9.962.000	18,067	10.036.000	18,067	10.209.000	Staf KIA

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					8.197.000		9.065.000		9.443.000		9.513.000		9.677.000	Staf KIA
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20,047	17,364	8.197.000	17,538	9.065.000	17,713	9.443.000	17,713	9.513.000	17,713	9.677.000	Staf KIA
1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					2.933.000		3.244.000		3.380.000		3.405.000		3.464.000	Staf KIA
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	66,570	66,409	2.933.000	67,073	3.244.000	67,744	3.380.000	68,421	3.405.000	69,098	3.464.000	Staf KIA
1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					430.483.000		476.027.000		495.848.000		499.486.000		508.071.000	Staf KIA
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Paket	1	92	430.483.000	92	476.027.000	92	495.848.000	92	499.486.000	92	508.071.000	Staf KIA

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	yang Didistribusikan													
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					212.335.000		234.800.000		244.577.000		246.372.000		250.607.000	Staf KIA
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dok.	1	12	212.335.000	12	234.800.000	12	244.577.000	12	246.372.000	12	250.607.000	Staf KIA
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.018.254.000		3.337.574.000		3.476.542.000		3.502.046.000		3.562.238.000	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
Tercapainya cakupan intervensi gizi pada balita dan ibu hamil dengan KEK	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan tata laksana	Persen	100%	100%	3.018.254.000	100%	3.337.574.000	100%	3.476.542.000	100%	3.502.046.000	100%	3.562.238.000	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
	Persentase Ibu hamil KEK atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					36.698.000		40.581.000		42.271.000		42.582.000		43.314.000	Staf PMG

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	224,808	224,693	36.698.000	224,715	40.581.000	224,738	42.271.000	224,760	42.582.000	224,782	43.314.000	Staf PMG
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					2.981.556.000		3.296.993.000		3.434.271.000		3.459.464.000		3.518.924.000	Staf PMG
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dok.	10	12	2.981.556.000	12	3.296.993.000	12	3.434.271.000	12	3.459.464.000	12	3.518.924.000	Staf PMG
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					23.379.580.000		25.853.049.000		26.929.499.000		27.127.047.000		27.593.294.000	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	Indeks kesehatan lingkungan		61,50%	72%		74%		78%		80%		82%		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat		100%	100%	23.379.580.000	100%	25.853.049.000	100%	26.929.499.000	100%	27.127.047.000	100%	27.593.294.000	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM					23.379.580.000		25.853.049.000		26.929.499.000		27.127.047.000		27.593.294.000	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														Promosi Kesehatan
Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kualitas air minum memenuhi syarat	Persen	86%	86%	23.379.580.000	89%	25.853.049.000	92%%	26.929.499.000	95%	27.127.047.000	99%	27.593.294.000	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
	Jumlah KLB Keracunan Pangan	Jumlah	6	6		4		6		6		4		Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
	Persentase kualitas udara di tempat fasilitas umum dan permukiman	Persen	65%	65%		70%		75%		80%		85%		Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
	Persentase kelurahan dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
	Persentase kelurahan dengan KK berperilaku cuci tangan pakai sabun	Persen	80%	80%		85%		90%		95%		100%		Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
	Persentase kelurahan dengan KK yang	Persen	80%	80%		85%		90%		95%		100%		Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	melakukan pengelolaan air minum dan pangan													Promosi Kesehatan
	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan sampah	Persen	82%	82%		86%		92%		96%		100%		Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan limbah cair	Persen	50%	50%		60%		70%		80%		90%		Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					133.989.000		148.165.000		154.335.000		155.468.000		158.141.000	Staf Kesling & Promkes
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dok.	5	5	133.989.000	5	148.165.000	5	154.335.000	5	155.468.000	5	158.141.000	Staf Kesling & Promkes
1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					23.245.591.000		25.704.884.000		26.775.164.000		26.971.579.000		27.435.153.000	Staf Kesling & Promkes
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dok.	9	9	23.245.591.000	9	25.704.884.000	9	26.775.164.000	9	26.971.579.000	9	27.435.153.000	Staf Kesling & Promkes

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					38.529.000		42.606.000		44.381.000		44.708.000		45.477.000	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya penanganan kesehatan bagi lanjut usia	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	40%	77%	38.529.000	79%	42.606.000	81%	44.381.000	83%	44.708.000	85%	45.477.000	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					38.529.000		42.606.000		44.381.000		44.708.000		45.477.000	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
Terselenggaranya pemantauan status kesehatan dan faktor risiko PTM pada lansia	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	Persen	25%	25%	38.529.000	27%	42.606.000	29%	44.381.000	31%	44.708.000	33%	45.477.000	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					14.965.000		16.549.000		17.239.000		17.366.000		17.665.000	Staf PMG
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	188,374	204,686	14.965.000	208,780	16.549.000	212,955	17.239.000	217,214	17.366.000	221,473	17.665.000	Staf PMG

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					23.564.000		26.057.000		27.142.000		27.342.000		27.812.000	Staf PMG
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dok	12	12	23.564.000	12	26.057.000	12	27.142.000	12	27.342.000	12	27.812.000	Staf PMG
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					1.624.509.000		1.796.383.000		1.871.188.000		1.884.922.000		1.917.327.000	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Angka *Incident Rate* (IR) HIV	Per 100	0,23	0,21	1.624.509.000	0,20	1.796.383.000	0,19	1.871.188.000	0,18	1.884.922.000	0,17	1.917.327.000	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Treatment Success Rate (TSR) TBC	Persen	89%	90,50%		91%		91,50%		92%		92,50%		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	0%	40%		50%		60%		70%		80%		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					158.842.000		175.648.000		182.964.000		184.307.000		187.477.000	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Terselenggaranya upaya deteksi dini dan akses pengobatan penyakit menular sesuai target	Jumlah ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	Orang	130	117	158.842.000	105	175.648.000	95	182.964.000	85	184.307.000	77	187.477.000	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
	Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan *(Enrollment* TBC)	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					65.607.000		72.548.000		75.569.000		76.124.000		77.433.000	Staf P2ML
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	31,901	27,274	65.607.000	27,274	72.548.000	23,456	75.569.000	20,730	76.124.000	18,004	77.433.000	Staf P2ML
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					56.085.000		62.019.000		64.602.000		65.076.000		66.195.000	Staf P2ML

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	27,245	29,783	56.085.000	30,379	62.019.000	30,987	64.602.000	31,607	65.076.000	32,227	66.195.000	Staf P2ML
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					13.606.000		15.046.000		15.673.000		15.788.000		16.060.000	Staf P2ML
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	6,748	5,897	13.606.000	5,051	15.046.000	4,344	15.673.000	3,056	15.788.000	1,768	16.060.000	Staf P2ML
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					23.544.000		26.035.000		27.120.000		27.319.000		27.789.000	Staf P2ML
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1,307	2,906	23.544.000	2,956	26.035.000	3,006	27.120.000	3,056	27.319.000	3,106	27.789.000	Staf P2ML
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan					517.788.000		572.569.000		596.410.000		600.786.000		611.113.000	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														Vektor dan Zoonotik
Terselenggaranya pemetaan wilayah prioritas intervensi untuk pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	Angka *Incident Rate* (IR) DBD	Angka	>= 16	>= 16	517.788.000	>= 16	572.569.000	>= 16	596.410.000	>= 16	600.786.000	>= 16	611.113.000	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
	AP Malaria	Angka	<1	<1		<1		<1		<1		<1		Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					502.272.000		555.411.000		578.537.000		582.781.000		592.798.000	Staf P2TVZ
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dok	12	12	502.272.000	12	555.411.000	12	578.537.000	12	582.781.000	12	592.798.000	Staf P2TVZ
1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					15.516.000		17.158.000		17.873.000		18.005.000		18.315.000	Staf P2TVZ
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	40	45	15.516.000	48	17.158.000	49	17.873.000	50	18.005.000	51	18.315.000	Staf P2TVZ

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					947.879.000		1.048.166.000		1.091.814.000		1.099.829.000		1.118.737.000	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persen	25%	25%	947.879.000	30%	1.048.166.000	35%	1.091.814.000	40%	1.099.829.000	45%	1.118.737.000	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	Persentase diabetes melitus dalam pengendalian	Persen	18%	18%		20%		23%		25%		27%		Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	80%	85%		90%		93%		95%		95%		Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun	Persen	7,40%	7%		6,80%		6,60%		6,40%		6,20%		Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	Prevalensi obesitas	Persen	25	25		25		25		25		25		Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase depresi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	1,5%	1,5%		2%		2%		2%		2,5%		Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					5.991.000		6.625.000		6.901.000		6.952.000		7.072.000	Staf P2TM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	288,750	289,923	5.991.000	292,822	6.625.000	295,750	6.901.000	298,708	6.952.000	301,666	7.072.000	Staf P2TM
1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					5.991.000		6.625.000		6.901.000		6.952.000		7.072.000	Staf P2TM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	34,561	42,965	5.991.000	43,395	6.625.000	43,829	6.901.000	44,267	6.952.000	44,705	7.072.000	Staf P2TM
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan					167.010.000		184.680.000		192.370.000		193.782.000		197.113.000	Staf P2TM

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dok	12	12	167.010.000	12	184.680.000	12	192.370.000	12	193.782.000	12	197.113.000	Staf P2TM
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					5.716.000		6.321.000		6.585.000		6.634.000		6.749.000	Staf P2TM
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12	12	5.716.000	12	6.321.000	12	6.585.000	12	6.634.000	12	6.749.000	Staf P2TM
1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi					250.000.000		276.450.000		287.961.000		290.074.000		295.060.000	Staf P2TM
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dok.	12	12	250.000.000	12	276.450.000	12	287.961.000	12	290.074.000	12	295.060.000	Staf P2TM
1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					377.870.000		417.848.000		435.247.000		438.440.000		445.976.000	Staf P2TM

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dok.	4	4	377.870.000	4	417.848.000	4	435.247.000	4	438.440.000	4	445.976.000	Staf P2TM
1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					48.713.000		53.867.000		56.110.000		56.522.000		57.494.000	Staf P2TM
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,114,865	1,116,696	48.713.000	1,127,863	53.867.000	1,139,142	56.110.000	1,150,533	56.522.000	1,161,924	57.494.000	Staf P2TM
1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					59.562.000		65.864.000		68.607.000		69.111.000		70.299.000	Staf P2TM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dok.	12	12	59.562.000	12	65.864.000	12	68.607.000	12	69.111.000	12	70.299.000	Staf P2TM
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.289.000		3.637.000		3.789.000		3.817.000		3.883.000	Staf P2TM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang yang	Orang	4,233	4,249	3.289.000	4,291	3.637.000	4,291	3.789.000	4,334	3.817.000	4,377	3.883.000	Staf P2TM

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar													
1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					5.004.000		5.534.000		5.765.000		5.808.000		5.908.000	Staf P2TM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	12	5.004.000	25	5.534.000	49	5.765.000	61	5.808.000	74	5.908.000	Staf P2TM
1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					18.733.000		20.715.000		21.578.000		21.737.000		22.111.000	Staf P2TM
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dok.	12	12	18.733.000	12	20.715.000	12	21.578.000	12	21.737.000	12	22.111.000	Staf P2TM
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Persentase fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terakreditasi minimal paripurna	Persen	95	95	115.720.148.049	95	127.962.869.900	95	133.290.865.275	95	134.268.626.650	95	136.576.351.758	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	85,5	85,5		86		86,5		87		87,5		Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					54.025.792.049		59.741.489.900		62.228.934.275		62.685.403.650		63.762.788.758	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
Terpenuhinya penyediaan fasilitas pelayan kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat SPA sesuai standar		100	100	54.025.792.049	100	59.741.489.900	100	62.228.934.275	100	62.685.403.650	100	63.762.788.758	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas					16.226.439.000		17.943.133.000		18.690.235.000		18.827.341.000		19.150.936.000	Staf PKPT
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	6	2	16.226.439.000	2	17.943.133.000	2	18.690.235.000	2	18.827.341.000	2	19.150.936.000	Staf PKPT

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					1.560.390.000		1.725.474.000		1.797.318.000		1.810.503.000		1.841.621.000	Staf PKPT
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	2	2	1.560.390.000	2	1.725.474.000	2	1.797.318.000	2	1.810.503.000	2	1.841.621.000	Staf PKPT
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					35.488.963.049		39.243.534.900		40.877.501.275		41.177.341.650		41.885.056.758	Staf PKPT
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	28	28	35.488.963.049	30	39.243.534.900	30	40.877.501.275	30	41.177.341.650	30	41.885.056.758	Staf PKPT
1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					750.000.000		829.348.000		863.880.000		870.218.000		885.175.000	Staf PKPT
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi	Unit	0	39	750.000.000	39	829.348.000	39	863.880.000	39	870.218.000	39	885.175.000	Staf PKPT

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center													
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.478.478.000		4.952.284.000		5.158.484.000		5.196.326.000		5.285.638.000	Sub Koor Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tercapainya respons time pelayanan gawat darurat sesuai standar	Persentase *respon time* pelayanan gawat darurat sesuai standar	Persen	100%	100%	4.478.478.000	100%	4.952.284.000	100%	5.158.484.000	100%	5.196.326.000	100%	5.285.638.000	Sub Koor Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					4.478.478.000		4.952.284.000		5.158.484.000		5.196.326.000		5.285.638.000	Staf Yankes Rujukan
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan	Unit	1	1	4.478.478.000	1	4.952.284.000	1	5.158.484.000	1	5.196.326.000	1	5.285.638.000	Staf Yankes Rujukan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					174.461.000		192.919.000		200.952.000		202.427.000		205.907.000	Sub Koor Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	Persen	100%	100%	174.461.000	100%	192.919.000	100%	200.952.000	100%	202.427.000	100%	205.907.000	Sub Koor Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					174.461.000		192.919.000		200.952.000		202.427.000		205.907.000	Staf Yankes Rujukan
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dok.	2	2	174.461.000	2	192.919.000	2	200.952.000	2	202.427.000	2	205.907.000	Staf Yankes Rujukan
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					11.159.519.000		12.340.154.000		12.853.966.000		12.948.260.000		13.170.810.000	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terjaminnya mutu pelayanan UKM dan UKP	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	Persen	95%	95%	11.159.519.000	95%	12.340.154.000	95%	12.853.966.000	95%	12.948.260.000	95%	13.170.810.000	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														Staf PKPT
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga		240	20.000.000	240	22.116.000	240	23.037.000	240	23.206.000	240	23.605.000	Staf PKPT
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														Staf PKPT
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dok.	4	4	11.091.422.000	4	12.264.852.000	4	12.775.528.000	4	12.869.246.000	4	13.090.437.000	Staf PKPT
1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														Staf PKPT Staf Puskesmas Poncol

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
														Staf Puskesmas Miroto Staf Puskesmas Bandarharjo Staf Puskesmas Bululor Staf Puskesmas Halmahera Staf Puskesmas Bugangan Staf Puskesmas Karangdoro Staf Puskesmas Pandanaran Staf Puskesmas Lamper Tengah Staf Puskesmas Karangayu Staf Puskesmas Lebdosari Staf Puskesmas Manyaran Staf Puskesmas Krobokan Staf Puskesmas Ngemplak Simongan Staf Puskesmas Gayamsari Staf Puskesmas Candilama

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
														Staf Puskesmas Kagok Staf Puskesmas Pegandan Staf Puskesmas Genuk Staf Puskesmas Bangetayu Staf Puskesmas Tlogosari Wetan Staf Puskesmas Tlogosari Kulon Staf Puskesmas Kedungmundu Staf Puskesmas Rowosari Staf Puskesmas Ngesrep Staf Puskesmas Padangsari Staf Puskesmas Srondol Staf Puskesmas Pudak Payung Staf Puskesmas Gunungpati Staf Puskesmas Mijen Staf Puskesmas Karang Malang

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
														Staf Puskesmas Tambakaji Staf Puskesmas Purwoyoso Staf Puskesmas Ngaliyan Staf Puskesmas Mangkang Staf Puskesmas Karanganyar Staf Puskesmas Sekaran Staf Puskesmas Bulusan Staf Puskesmas Plamongansari Staf Puskesmas Kaligawe
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	226	226	48.097.000	226	53.186.000	226	55.401.000	226	55.808.000	226	56.768.000	Staf PKPT Staf Puskesmas Poncol Staf Puskesmas Miroto Staf Puskesmas Bandarharjo Staf Puskesmas Bululor Staf Puskesmas Halmahera

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
														Staf Puskesmas Bugangan Staf Puskesmas Karangdoro Staf Puskesmas Pandanaran Staf Puskesmas Lamper Tengah Staf Puskesmas Karangayu Staf Puskesmas Lebdosari Staf Puskesmas Manyaran Staf Puskesmas Krobokan Staf Puskesmas Ngemplak Simongan Staf Puskesmas Gayamsari Staf Puskesmas Candilama Staf Puskesmas Kagok Staf Puskesmas Pegandan Staf Puskesmas Genuk Staf Puskesmas Bangetayu

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
														Staf Puskesmas Tlogosari Wetan Staf Puskesmas Tlogosari Kulon Staf Puskesmas Kedungmundu Staf Puskesmas Rowosari Staf Puskesmas Ngesrep Staf Puskesmas Padangsari Staf Puskesmas Srondol Staf Puskesmas Pudak Payung Staf Puskesmas Gunungpati Staf Puskesmas Mijen Staf Puskesmas Karang Malang Staf Puskesmas Tambakaji Staf Puskesmas Purwoyoso Staf Puskesmas Ngaliyan Staf Puskesmas Mangkang

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
														Staf Puskesmas Karanganyar Staf Puskesmas Sekaran Staf Puskesmas Bulusan Staf Puskesmas Plamongansari Staf Puskesmas Kaligawe
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					721.177.000		797.475.000		830.680.000		836.774.000		851.157.000	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
Meningkatnya fasyankes yang mencapai target indikator nasional mutu pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas yang mencapai target indikator nasional mutu	Persen	100%	100%	721.177.000	100%	797.475.000	100%	830.680.000	100%	836.774.000	100%	851.157.000	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					721.177.000		797.475.000		830.680.000		836.774.000		851.157.000	Staf PKPT
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	Unit	37	37	721.177.000	40	797.475.000	42	830.680.000	42	836.774.000	42	851.157.000	Staf PKPT

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan													
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					45.160.721.000		49.938.548.000		52.017.849.000		52.399.436.000		53.300.051.000	Sub Koordinator Jaminan Kesehatan
Tercapainya cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase kenaikan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	0,5%	0,5%	45.160.721.000	0,5%	49.938.548.000	0,5%	52.017.849.000	0,5%	52.399.436.000	0,5%	53.300.051.000	Sub Koordinator Jaminan Kesehatan
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					45.160.721.000		49.938.548.000		52.017.849.000		52.399.436.000		53.300.051.000	Staf Yankes Jamkes
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dok.	12	12	45.160.721.000	12	49.938.548.000	12	52.017.849.000	12	52.399.436.000	12	53.300.051.000	Staf Yankes Jamkes
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					22.436.983.000		24.810.729.000		25.843.780.000		26.033.363.000		26.480.813.000	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan obat PKD, obat program dan	Proporsi faskes dengan perbekalan	Persen	83	86	22.436.983.000	89	24.810.729.000	92	25.843.780.000	95	26.033.363.000	98	26.480.813.000	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
vaksin serta perbekalan di fasilitas pelayanan kesehatan	kesehatan sesuai standar													
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					21.336.098.000		23.593.374.000		24.575.737.000		24.756.018.000		25.181.513.000	Kepala UPTD instalasi Farmasi
Meningkatnya efektivitas pengadaan dan distribusi obat, bahan habis pakai, vaksin ke fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar	Persen	100%	100%	21.336.098.000	100%	23.593.374.000	100%	24.575.737.000	100%	24.756.018.000	100%	25.181.513.000	Kepala UPTD instalasi Farmasi
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					21.311.098.000		23.565.729.000		24.546.940.000		24.727.009.000		25.152.005.000	Kasubag TU Instalasi Farmasi dan Staf UPTD Instalasi Farmasi
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	150	150	21.311.098.000	175	23.565.729.000	200	24.546.940.000	210	24.727.009.000	225	25.152.005.000	Kasubag TU Instalasi Farmasi dan Staf UPTD Instalasi Farmasi
1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat					25.000.000		27.645.000		28.797.000		29.009.000		29.508.000	Kasubag TU Instalasi Farmasi

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														dan Staf UPTD Instalasi Farmasi
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	78	78	25.000.000	78	27.645.000	78	28.797.000	78	29.009.000	78	29.508.000	Kasubag TU Instalasi Farmasi dan Staf UPTD Instalasi Farmasi
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.100.885.000		1.217.355.000		1.268.043.000		1.277.345.000		1.299.300.000	Kepala UPTD instalasi Farmasi
Meningkatnya kegiatan operasioanal Instalasi Farmasi sesuai standar	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	Persen	100%	100%	1.100.885.000	100%	1.217.355.000	100%	1.268.043.000	100%	1.277.345.000	100%	1.299.300.000	Kepala UPTD instalasi Farmasi
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.100.885.000		1.217.355.000		1.268.043.000		1.277.345.000		1.299.300.000	Kasubag TU Instalasi Farmasi dan Staf UPTD Instalasi Farmasi
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	Dok.	12	12	1.100.885.000	12	1.217.355.000	12	1.268.043.000	12	1.277.345.000	12	1.299.300.000	Kasubag TU Instalasi Farmasi dan Staf UPTD Instalasi Farmasi

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kesehatan Lainnya													
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Meningkatnya kualitas manajemen informasi kesehatan	Proporsi fasilitas layanan kesehatan yang terintegrasi SIKN	Persen	67,6	67,6	1.425.006.000	70,7	1.575.767.000	72,4	1.641.378.000	74,3	1.653.420.000	76,43	1.681.839.000	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					1.411.094.000		1.560.383.000		1.625.353.000		1.637.277.000		1.665.418.000	Sub Koordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan
Meningkatnya integrasi data kesehatan daerah melalui sistem informasi yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	Persen	60%	60%	1.411.094.000	70%	1.560.383.000	80%	1.625.353.000	90%	1.637.277.000	95%	1.665.418.000	Sub Koordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan
	Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN	Persen	63,08%	63,08%		67,60%		70,71%		72,39%		74,33%		Sub Koordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1.411.094.000		1.560.383.000		1.625.353.000		1.637.277.000		1.665.418.000	Staf Infokes
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dok	12	12	1.411.094.000	12	1.560.383.000	12	1.625.353.000	12	1.637.277.000	12	1.665.418.000	Staf Infokes

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Sistem Informasi Kesehatan													
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					13.912.000		15.384.000		16.025.000		16.143.000		16.421.000	Sub Koordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan
Terlaksananya pengawasan terhadap Rumah Sakit Kelas C dan D	Persentase RS Kelas C dan D yang telah diawasi	Persen	100%	100%	13.912.000	100%	15.384.000	100%	16.025.000	100%	16.143.000	100%	16.421.000	Sub Koordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan
1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					13.912.000		15.384.000		16.025.000		16.143.000		16.421.000	Staf Infokes
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	100	100	13.912.000	100	15.384.000	100	16.025.000	100	16.143.000	100	16.421.000	Di Staf Infokes

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					584.426.711		646.256.500		673.167.703		678.110.908		689.770.906	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	26%	26%	584.426.711	34%	646.256.500	43%	673.167.703	53%	678.110.908	55%	689.770.906	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					110.000.000		121.638.000		126.705.000		127.637.000		129.833.000	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tercapainya pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kompetensi dan kebutuhan layanan UKP dan UKM	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Persen	21%	21%	110.000.000	26%	121.638.000	34%	126.705.000	43%	127.637.000	53%	129.833.000	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber					5.000.000		5.529.000		5.760.000		5.803.000		5.903.000	Staf SDMK

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Daya Manusia Kesehatan														
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dok.	1	1	5.000.000	1	5.529.000	1	5.760.000	1	5.803.000	1	5.903.000	Staf SDMK
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					25.000.000		27.645.000		28.797.000		29.009.000		29.508.000	Staf SDMK
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	39	39	25.000.000	40	27.645.000	40	28.797.000	40	29.009.000	40	29.508.000	Staf SDMK
1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					80.000.000		88.464.000		92.148.000		92.825.000		94.422.000	Staf SDMK
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	Dok.	1	1	80.000.000	1	88.464.000	1	92.148.000	1	92.825.000	1	94.422.000	Staf SDMK

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Manusia Kesehatan													
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					474.426.711		524.618.500		546.462.703		550.473.908		559.937.906	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Jumlah workshop/seminar/bimtek peningkatan mutu yang dilaksanakan	Jumlah	6	6	474.426.711	6	524.618.500	6	546.462.703	6	550.473.908	6	559.937.906	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					474.426.711		524.618.500		546.462.703		550.473.908		559.937.906	Staf SDMK
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	30	30	474.426.711	30	524.618.500	30	546.462.703	30	550.473.908	30	559.937.906	Staf SDMK

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					288.234.058		318.727.961		332.000.327		334.438.271		340.188.879	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	78%	78%		80%		85%		88%		90%		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Proporsi apotek, toko obat, usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar	Persen	83%	83%	288.234.058	85%	318.727.961	89%	332.000.327	91%	334.438.271	95%	340.188.879	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					194.028.058		214.554.961		223.488.327		225.128.271		228.998.879	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya jumlah IRT Pangan yang memperoleh SPP-IRT dan memenuhi komitmen keamanan pangan sesuai standar yang berlaku	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Persen	100%	100%	194.028.058	100%	214.554.961	100%	223.488.327	100%	225.128.271	100%	228.998.879	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					194.028.058		214.554.961		223.488.327		225.128.271		228.998.879	Staf Farmamin
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dok.	2.196	2.196	194.028.058	2.218	214.554.961	2,24	223.488.327	2.263	225.128.271	2.263	228.998.879	Staf Farmamin
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi					79.775.000		88.215.000		91.889.000		92.564.000		94.156.000	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga														
Meningkatnya kualitas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan post market pada produk makanan minuman IRTP	Persentase temuan hasil pemeriksaan *post market* yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Persen	100%	100%	79.775.000	100%	88.215.000	100%	91.889.000	100%	92.564.000	100%	94.156.000	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					79.775.000		88.215.000		91.889.000		92.564.000		94.156.000	Staf Farmamin
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	12	12	79.775.000	12	88.215.000	12	91.889.000	12	92.564.000	12	94.156.000	Staf Farmamin
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan					14.431.000		15.958.000		16.623.000		16.746.000		17.034.000	Sub Koordinator Kefarmasian dan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														Perbekalan Kesehatan
Tercapainya kepatuhan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, serta UMOT terhadap ketentuan perizinan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	14.431.000	100%	15.958.000	100%	16.623.000	100%	16.746.000	100%	17.034.000	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					14.431.000		15.958.000		16.623.000		16.746.000		17.034.000	Staf Farmamin
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dok.	12	12	14.431.000	12	15.958.000	12	16.623.000	12	16.746.000	12	17.034.000	Staf Farmamin

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sasaran 2: Meningkatnya pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan aktivitas fisik	Persen	1,13%	20.34%	329,410,353	24.86%	364,260,527	29.38%	379,428,945	39.55%	382,215,167	49.72%	388,787,290	Kepala Dinas Kesehatan
1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup	Persen	82%	82%	329.410.353	84%	364.260.527	86%	379.428.945	88%	382.215.167	90%	388.787.290	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					60.000.000		66.348.000		69.111.000		69.619.000		70.817.000	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
Terjalinnya kemitraan lintas sektor dalam mendukung program kesehatan masyarakat	Persentase kemitraan/kerja sama lintas sektor dan atau mitra non-pemerintah yang terjalin dan aktif	Persen	82%	82%	60.000.000	84%	66.348.000	86%	69.111.000	88%	69.619.000	90%	70.817.000	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					60.000.000		66.348.000		69.111.000		69.619.000		70.817.000	Staf Kesling & Promkes
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dok.	12	12	60.000.000	12	66.348.000	12	69.111.000	12	69.619.000	12	70.817.000	Staf Kesling & Promkes
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					120.000.000		132.696.000		138.222.000		139.237.000		141.632.000	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
Terlaksananya kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di tingkat daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye GERMAS	Jumlah	12	12	120.000.000	12	132.696.000	12	138.222.000	12	139.237.000	12	141.632.000	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					120.000.000		132.696.000		138.222.000		139.237.000		141.632.000	Staf Kesling & Promkes
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi	Dok.	12	12	120.000.000	12	132.696.000	12	138.222.000	12	139.237.000	12	141.632.000	Staf Kesling & Promkes

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					149.410.353		165.216.527		172.095.945		173.359.167		176.338.290	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
Meningkatnya jumlah Posyandu yang aktif memberikan layanan kesehatan sesuai siklus hidup	Cakupan posyandu aktif siklus hidup yang aktif	Persen	100%	100%	149.410.353	100%	165.216.527	100%	172.095.945	100%	173.359.167	100%	176.338.290	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					149.410.353		165.216.527		172.095.945		173.359.167		176.338.290	Staf PMG
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dok.	12	12	149.410.353	12	165.216.527	12	172.095.945	12	173.359.167	12	176.338.290	Staf PMG
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Angka	79.70	81.5	412,332,932,198	82.25	473,420,754,345	83,3	485,025,264,724	84,32	464,762,867,009	85,03	451,787,939,760	Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
kinerja pelayanan Dinas Kesehatan	Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan													
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Angka	95.4	95.6		95.7		95,8		95,9		96		Kepala Dinas Kesehatan
1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					412,332,932,198		473,420,754,345		485,025,264,724		464,762,867,009		451,787,939,760	Sekretaris
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sekretaris
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sekretaris
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					94.889.565.955		102.531.835.570		109.739.064.060		117.453.798.543		125.711.864.439	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan	Persen	100%	100%	94.889.565.955	100%	102.531.835.570	100%	109.739.064.060	100%	117.453.798.543	100%	125.711.864.439	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan penunjang pelayanan.	layanan dan penunjang pelayanan.													
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.047.478.897		2.190.802.419		2.344.158.589		2.508.249.690		2.683.827.168	Puskesmas Poncol
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.047.478.897	1	2.190.802.419	1	2.344.158.589	1	2.508.249.690	1	2.683.827.168	Puskesmas Poncol
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.663.804.332		1.780.270.636		1.904.889.580		2.038.231.851		2.180.908.080	Puskesmas Miroto
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.663.804.332	1	1.780.270.636	1	1.904.889.580	1	2.038.231.851	1	2.180.908.080	Puskesmas Miroto
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.857.784.612		3.057.829.535		3.271.877.602		3.500.909.034		3.745.972.667	Puskesmas Bandarharjo
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.857.784.612	1	3.057.829.535	1	3.271.877.602	1	3.500.909.034	1	3.745.972.667	Puskesmas Bandarharjo

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.205.084.205		2.359.440.100		2.524.600.907		2.701.322.970		2.890.415.578	Puskesmas Bulu Lor
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.205.084.205	1	2.359.440.100	1	2.524.600.907	1	2.701.322.970	1	2.890.415.578	Puskesmas Bulu Lor
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.799.293.982		2.995.244.561		3.204.911.680		3.429.255.498		3.669.303.382	Puskesmas Halmahera
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.799.293.982	1	2.995.244.561	1	3.204.911.680	1	3.429.255.498	1	3.669.303.382	Puskesmas Halmahera
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.680.126.102		1.797.734.929		1.923.576.374		2.058.226.720		2.202.302.590	Puskesmas Bugangan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.680.126.102	1	1.797.734.929	1	1.923.576.374	1	2.058.226.720	1	2.202.302.590	Puskesmas Bugangan
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.210.411.030		3.435.139.802		3.675.599.588		3.932.891.559		4.208.193.968	Puskesmas Karangdoro

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	3.210.411.030	1	3.435.139.802	1	3.675.599.588	1	3.932.891.559	1	4.208.193.968	Puskesmas Karangdoro
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.675.523.273		2.862.809.902		3.063.206.595		3.277.631.057		3.507.065.231	Puskesmas Pandanaran
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.675.523.273	1	2.862.809.902	1	3.063.206.595	1	3.277.631.057	1	3.507.065.231	Puskesmas Pandanaran
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.712.276.328		1.832.135.670		1.960.385.167		2.097.612.129		2.244.444.978	Puskesmas Lamper Tengah
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.712.276.328	1	1.832.135.670	1	1.960.385.167	1	2.097.612.129	1	2.244.444.978	Puskesmas Lamper Tengah
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.446.525.039		1.547.781.792		1.656.126.517		1.772.055.374		1.896.099.250	Puskesmas Karangayu
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Unit Kerja	1	1	1.446.525.039	1	1.547.781.792	1	1.656.126.517	1	1.772.055.374	1	1.896.099.250	Puskesmas Karangayu

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Penunjang Pelayanan													
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.884.837.100		2.016.775.697		2.157.949.996		2.309.006.495		2.470.636.950	Puskesmas Lebdosari
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.884.837.100	1	2.016.775.697	1	2.157.949.996	1	2.309.006.495	1	2.470.636.950	Puskesmas Lebdosari
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.041.147.836		2.184.028.185		2.336.910.157		2.500.493.868		2.675.528.439	Puskesmas Manyaran
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.041.147.836	1	2.184.028.185	1	2.336.910.157	1	2.500.493.868	1	2.675.528.439	Puskesmas Manyaran
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.660.455.960		1.776.687.877		1.901.056.029		2.034.129.951		2.176.519.047	Puskesmas Krobokan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.660.455.960	1	1.776.687.877	1	1.901.056.029	1	2.034.129.951	1	2.176.519.047	Puskesmas Krobokan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.426.285.497		1.526.125.482		1.632.954.266		1.747.261.064		1.869.569.339	Puskesmas Ngemplak Simongan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.426.285.497	1	1.526.125.482	1	1.632.954.266	1	1.747.261.064	1	1.869.569.339	Puskesmas Ngemplak Simongan
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.361.141.889		3.596.421.821		3.848.171.349		4.117.543.343		4.405.771.377	Puskesmas Gayamsari
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	3.361.141.889	1	3.596.421.821	1	3.848.171.349	1	4.117.543.343	1	4.405.771.377	Puskesmas Gayamsari
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.871.629.384		2.002.643.441		2.142.828.482		2.292.826.475		2.453.324.328	Puskesmas Candilama
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.871.629.384	1	2.002.643.441	1	2.142.828.482	1	2.292.826.475	1	2.453.324.328	Puskesmas Candilama
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.756.966.750		1.879.954.423		2.011.551.232		2.152.359.818		2.303.025.006	Puskesmas Kagok

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.756.966.750	1	1.879.954.423	1	2.011.551.232	1	2.152.359.818	1	2.303.025.006	Puskesmas Kagok
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.209.492.370		2.364.156.836		2.529.647.814		2.706.723.161		2.896.193.782	Puskesmas Pegandan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.209.492.370	1	2.364.156.836	1	2.529.647.814	1	2.706.723.161	1	2.896.193.782	Puskesmas Pegandan
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.187.527.528		2.340.654.454		2.504.500.266		2.679.815.285		2.867.402.355	Puskesmas Genuk
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.187.527.528	1	2.340.654.454	1	2.504.500.266	1	2.679.815.285	1	2.867.402.355	Puskesmas Genuk
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					4.646.557.155		4.971.816.155		5.319.843.286		5.692.232.316		6.090.688.578	Puskesmas Bangetayu
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Unit Kerja	1	1	4.646.557.155	1	4.971.816.155	1	5.319.843.286	1	5.692.232.316	1	6.090.688.578	Puskesmas Bangetayu

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Penunjang Pelayanan													
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.536.350.000		3.783.894.500		4.048.767.115		4.332.180.813		4.635.433.470	Puskesmas Tlogosari Wetan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	3.536.350.000	1	3.783.894.500	1	4.048.767.115	1	4.332.180.813	1	4.635.433.470	Puskesmas Tlogosari Wetan
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.787.143.277		4.052.243.306		4.335.900.338		4.639.413.361		4.964.172.297	Puskesmas Tlogosari Kulon
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	3.787.143.277	1	4.052.243.306	1	4.335.900.338	1	4.639.413.361	1	4.964.172.297	Puskesmas Tlogosari Kulon
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					4.866.311.722		5.206.953.542	1	5.571.440.290		5.961.441.110		6.378.741.988	Puskesmas Kedungmundu
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	4.866.311.722	1	5.206.953.542	1	5.571.440.290	1	5.961.441.110	1	6.378.741.988	Puskesmas Kedungmundu

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.091.583.340		3.307.994.173		3.539.553.766		3.787.322.529		4.052.435.106	Puskesmas Rowosari
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	3.091.583.340	1	3.307.994.173	1	3.539.553.766	1	3.787.322.529	1	4.052.435.106	Puskesmas Rowosari
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.233.773.644		2.390.137.800		2.557.447.445		2.736.468.767		2.928.021.580	Puskesmas Ngesrep
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.233.773.644	1	2.390.137.800	1	2.557.447.445	1	2.736.468.767	1	2.928.021.580	Puskesmas Ngesrep
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.299.463.726		2.460.426.187		2.632.656.020		2.816.941.942		3.014.127.878	Puskesmas Padangsari
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.299.463.726	1	2.460.426.187	1	2.632.656.020	1	2.816.941.942	1	3.014.127.878	Puskesmas Padangsari
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.297.999.378		2.458.859.334		2.630.979.488		2.815.148.052		3.012.208.416	Puskesmas Srondol

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.297.999.378	1	2.458.859.334	1	2.630.979.488	1	2.815.148.052	1	3.012.208.416	Puskesmas Srondol
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.814.835.111		1.941.873.568		2.077.804.718		2.223.251.048		2.378.878.622	Puskesmas Pudak Payung
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.814.835.111	1	1.941.873.568	1	2.077.804.718	1	2.223.251.048	1	2.378.878.622	Puskesmas Pudak Payung
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.945.204.169		4.221.368.461		4.516.864.253		4.833.044.751		5.171.357.883	Puskesmas Gunungpati
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	3.945.204.169	1	4.221.368.461	1	4.516.864.253	1	4.833.044.751	1	5.171.357.883	Puskesmas Gunungpati
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.081.555.873		3.297.264.784		3.528.073.319		3.775.038.452		4.039.291.143	Puskesmas Mijen
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Unit Kerja	1	1	3.081.555.873	1	3.297.264.784	1	3.528.073.319	1	3.775.038.452	1	4.039.291.143	Puskesmas Mijen

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Penunjang Pelayanan													
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.044.068.829		2.187.153.647		2.340.254.402		2.504.072.210		2.679.357.265	Puskesmas Karangmalang
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.044.068.829	1	2.187.153.647	1	2.340.254.402	1	2.504.072.210	1	2.679.357.265	Puskesmas Karangmalang
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.673.822.890		1.790.990.492		1.916.359.827		2.050.505.015		2.194.040.366	Puskesmas Tambakaji
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.673.822.890	1	1.790.990.492	1	1.916.359.827	1	2.050.505.015	1	2.194.040.366	Puskesmas Tambakaji
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.667.841.956		1.784.590.893		1.909.512.255		2.043.178.113		2.186.200.581	Puskesmas Purwoyoso
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.667.841.956	1	1.784.590.893	1	1.909.512.255	1	2.043.178.113	1	2.186.200.581	Puskesmas Purwoyoso

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					4.097.466.560		4.384.289.219		4.691.189.465		5.019.572.727		5.370.942.818	Puskesmas Ngaliyan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	4.097.466.560	1	4.384.289.219	1	4.691.189.465	1	5.019.572.727	1	5.370.942.818	Puskesmas Ngaliyan
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.822.831.323		1.950.429.516		2.086.959.582		2.233.046.753		2.389.360.026	Puskesmas Mangkang
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.822.831.323	1	1.950.429.516	1	2.086.959.582	1	2.233.046.753	1	2.389.360.026	Puskesmas Mangkang
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.452.702.599		1.554.391.781		1.663.199.205		1.779.623.149		1.904.196.770	Puskesmas Karanganyar
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.452.702.599	1	1.554.391.781	1	1.663.199.205	1	1.779.623.149	1	1.904.196.770	Puskesmas Karanganyar
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.172.113.011		2.324.160.922		2.486.852.187		2.660.931.840		2.847.197.068	Puskesmas Sekaran

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	1	2.172.113.011	1	2.324.160.922	1	2.486.852.187	1	2.660.931.840	1	2.847.197.068	Puskesmas Sekaran
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					909.500.000		973.165.000		1.041.286.550		1.114.176.609		1.192.168.971	Puskesmas Bulusan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	1	909.500.000	1	973.165.000	1	1.041.286.550	1	1.114.176.609	1	1.192.168.971	Puskesmas Bulusan
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.001.649.278		2.141.764.728		2.291.688.259		2.452.106.437		2.623.753.887	Puskesmas Plamongansari
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	1	2.001.649.278	1	2.141.764.728	1	2.291.688.259	1	2.452.106.437	1	2.623.753.887	Puskesmas Plamongansari
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					-		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000	Puskesmas Kaligawe
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Unit kerja	0	0	-	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.331.000.000	Puskesmas Kaligawe

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Penunjang Pelayanan													
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					749.000.000		801.430.000		857.530.100		917.557.207		981.786.211	Laboratorium Kesehatan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	1	749.000.000	1	801.430.000	1	857.530.100	1	917.557.207	1	981.786.211	Laboratorium Kesehatan
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					103.621.000		123.207.000		123.950.000		112.235.000		103.056.000	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	Persen	100%	100%	103.621.000	100%	123.207.000	100%	123.950.000	100%	112.235.000	100%	103.056.000	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					47.050.000		55.942.000		56.278.000		50.958.000		46.789.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Dok.	4	4	47.050.000	4	55.942.000	4	56.278.000	4	50.958.000	4	46.789.000	Staf Perencanaan & Evaluasi

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7.216.000		8.580.000		8.632.000		7.816.000		7.177.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok.	1	1	7.216.000	1	8.580.000	1	8.632.000	1	7.816.000	1	7.177.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					8.607.000		10.234.000		10.296.000		9.323.000		8.561.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok.	1	1	8.607.000	1	10.234.000	1	10.296.000	1	9.323.000	1	8.561.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					3.383.000		4.023.000		4.048.000		3.666.000		3.367.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dok.	1	1	3.383.000	1	4.023.000	1	4.048.000	1	3.666.000	1	3.367.000	Staf Perencanaan & Evaluasi

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Dokumen DPA-SKPD													
1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2.869.000		3.412.000		3.433.000		3.109.000		2.855.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok.	1	1	2.869.000	1	3.412.000	1	3.433.000	1	3.109.000	1	2.855.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Staf Perencanaan & Evaluasi
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Dok.	8	4	7.495.000	4	8.912.000	4	8.966.000	4	8.119.000	4	7.455.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					27.001.000		32.104.000		32.297.000		29.244.000		26.852.000	Staf Perencanaan & Evaluasi
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Dok.	1	1	27.001.000	1	32.104.000	1	32.297.000	1	29.244.000	1	26.852.000	Staf Perencanaan & Evaluasi

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Statistik Sektoral Daerah Dinas Kesehatan													
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					300,493,748,243		350,736,206,775		355,012,770,664		328,952,333,466		309,221,358,321	Staf Perencanaan & Evaluasi
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	Persen	100%	100%	300,493,748,243	100%	350,736,206,775	100%	355,012,770,664	100%	328,952,333,466	100%	309,221,358,321	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					299,894,673,243		350,043,122,775		354,306,432,664		328,285,678,466		308,582,725,321	Staf Keuangan dan BMD
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	2382	2.750	299,894,673,243	2.800	350,043,122,775	2.850	354,306,432,664	2.900	328,285,678,466	2.950	308,582,725,321	Staf Keuangan dan BMD
1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					584.140.000		675.803.000		688.725.000		650.030.000		622.705.000	Staf Keuangan dan BMD
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok.	12	12	584.140.000	12	675.803.000	12	688.725.000	12	650.030.000	12	622.705.000	Staf Keuangan dan BMD

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					4.870.000		5.635.000		5.743.000		5.421.000		5.194.000	Staf Keuangan dan BMD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	4.870.000	1	5.635.000	1	5.743.000	1	5.421.000	1	5.194.000	Staf Keuangan dan BMD
1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					4.978.000		5.760.000		5.871.000		5.542.000		5.310.000	Staf Keuangan dan BMD
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	1	2	4.978.000	2	5.760.000	2	5.871.000	2	5.542.000	2	5.310.000	Staf Keuangan dan BMD

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					5.087.000		5.886.000		5.999.000		5.662.000		5.424.000	Staf Keuangan dan BMD
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok.	1	1	5.087.000	1	5.886.000	1	5.999.000	1	5.662.000	1	5.424.000	Staf Keuangan dan BMD
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000		23.780.000		23.924.000		21.664.000		19.892.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan kepegawaian Dinas Kesehatan yang memenuhi prosedur dan sesuai standar	Persen	100%	100%	20.000.000	100%	23.780.000	100%	23.924.000	100%	21.664.000	100%	19.892.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					10.000.000		11.890.000		11.962.000		10.832.000		9.946.000	Staf Umpeg
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok.	1	1	10.000.000	1	11.890.000	1	11.962.000	1	10.832.000	1	9.946.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis					10.000.000		11.890.000		11.962.000		10.832.000		9.946.000	Staf Umpeg

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	2	10.000.000	2	11.890.000	2	11.962.000	2	10.832.000	2	9.946.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.712.631.000	100%	3.225.259.000	100%	3.244.581.000	100%	2.937.833.000	100%	2.697.451.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan	Persen	100%	100%	2.712.631.000	100%	3.225.259.000	100%	3.244.581.000	100%	2.937.833.000	100%	2.697.451.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					48.315.000		57.446.000		57.791.000		52.328.000		48.047.000	Staf Umpeg
Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	11	48.315.000	11	57.446.000	11	57.791.000	11	52.328.000	11	48.047.000	Staf Umpeg

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					41.129.000		48.902.000		49.195.000		44.544.000		40.900.000	Staf Umpeg
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	23	11	41.129.000	11	48.902.000	11	49.195.000	11	44.544.000	11	40.900.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					80.000.000		95.119.000		95.689.000		86.643.000		79.554.000	Staf Umpeg
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	80.000.000	12	95.119.000	12	95.689.000	12	86.643.000	12	79.554.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					52.130.000		61.982.000		62.354.000		56.459.000		51.840.000	Staf Umpeg
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	6	52.130.000	6	61.982.000	6	62.354.000	6	56.459.000	6	51.840.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.710.000		4.412.000		4.439.000		4.020.000		3.692.000	Staf Umpeg
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dok.	12	1	3.710.000	1	4.412.000	1	4.439.000	1	4.020.000	1	3.692.000	Staf Umpeg

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Undangan yang Disediakan													
1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu					100.000.000		118.898.000		119.611.000		108.303.000		99.442.000	Staf Umpeg
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100.000.000	12	118.898.000	12	119.611.000	12	108.303.000	12	99.442.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					826.588.000		982.794.000		988.681.000		895.209.000		821.959.000	Staf Umpeg
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.200	826.588.000	1.200	982.794.000	1.200	988.681.000	12	895.209.000	12	821.959.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1.560.759.000		1.855.706.000		1.866.821.000		1.690.327.000		1.552.017.000	Staf Umpeg
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok.	4	5	1.560.759.000	5	1.855.706.000	5	1.866.821.000	5	1.690.327.000	5	1.552.017.000	Staf Umpeg

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.753.153.000		8.029.342.000		8.077.434.000		7.313.771.000		6.715.326.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persen	100%	100%	6.753.153.000	100%	8.029.342.000	100%	8.077.434.000	100%	7.313.771.000	100%	6.715.326.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					500.000.000		594.489.000		598.050.000		541.509.000		497.201.000	Staf Umpeg
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	500.000.000	11	594.489.000	12	598.050.000	13	541.509.000	14	497.201.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					6.253.153.000		7.434.853.000		7.479.384.000		6.772.262.000		6.218.125.000	Staf Umpeg
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	10	6.253.153.000	10	7.434.853.000	10	7.479.384.000	10	6.772.262.000	10	6.218.125.000	Staf Umpeg

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.678.701.000		3.184.914.000		3.203.991.000		2.901.077.000		2.663.698.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	2.678.701.000	100%	3.184.914.000	100%	3.203.991.000	100%	2.901.077.000	100%	2.663.698.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					194.000		231.000		233.000		211.000		194.000	Staf Umpeg
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	11	194.000	12	231.000	12	233.000	12	211.000	12	194.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					922.711.000		1.097.082.000		1.103.653.000		999.311.000		917.543.000	Staf Umpeg
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	922.711.000	12	1.097.082.000	12	1.103.653.000	12	999.311.000	12	917.543.000	Staf Umpeg

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.755.796.000		2.087.601.000		2.100.105.000		1.901.555.000		1.745.961.000	Staf Umpeg
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.755.796.000	12	2.087.601.000	12	2.100.105.000	12	1.901.555.000	12	1.745.961.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.681.512.000		5.566.210.000		5.599.550.000		5.070.155.000		4.655.294.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan sesuai ketentuan	Persen	100%	100%	4.681.512.000	100%	5.566.210.000	100%	5.599.550.000	100%	5.070.155.000	100%	4.655.294.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					186.366.000		221.585.000		222.913.000		201.839.000		185.324.000	Staf Umpeg

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	186.366.000	6	221.585.000	6	222.913.000	6	201.839.000	6	185.324.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.162.113.000		2.570.702.000		2.586.099.000		2.341.602.000		2.150.002.000	Staf Umpeg
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	134	150	2.162.113.000	155	2.570.702.000	155	2.586.099.000	155	2.341.602.000	155	2.150.002.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					672.012.000		799.007.000		803.793.000		727.801.000		668.249.000	Staf Umpeg
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	10	672.012.000	13	799.007.000	15	803.793.000	10	727.801.000	10	668.249.000	Staf Umpeg

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.609.262.000		1.913.375.000		1.924.835.000		1.742.856.000		1.600.248.000	Staf Umpeg
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	28	3	1.609.262.000	4	1.913.375.000	5	1.924.835.000	4	1.742.856.000	4	1.600.248.000	Staf Umpeg
1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					51.759.000		61.541.000		61.910.000		56.057.000		51.471.000	Staf Umpeg
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1	51.759.000	1	61.541.000	1	61.910.000	1	56.057.000	1	51.471.000	Staf Umpeg
Sasaran 4: Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen	Net Death Rate (NDR) RSUD Mijen	Permil	35	33	5,050,000,000	30	5,555,000,000	28	6,110,500,000	26	6,721,550,000	24	7,393,705,000	Kepala Dinas Kesehatan
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan					13.000.000		14.300.000		15.730.000		17.303.000		19.033.300	Direktur RSUD Mijen

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap Penduduk Kota Semarang	Persen	5%	7%	13.000.000	8%	14.300.000	9%	15.730.000	10%	17.303.000	11%	19.033.300	Direktur RSUD Mijen
Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen	Persen	80	82		84		86		88		90		Direktur RSUD Mijen
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					7.000.000		7.700.000		8.470.000		9.317.000		10.248.700	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang
Tersedianya sarana, prasarana, obat, dan bahan penunjang pelayanan rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan bahan penunjang di RSUD Mijen	Persen	100%	100%	7.000.000	100%	7.700.000	100%	8.470.000	100%	9.317.000	100%	10.248.700	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	Staf Pelayanan Penunjang

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	6	6	2.000.000	6	2.200.000	6	2.420.000	6	2.662.000	6	2.928.200	Staf Pelayanan Penunjang
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit					5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500	Staf Pelayanan Penunjang
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Unit	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	Staf Pelayanan Penunjang
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					6.000.000		6.600.000		7.260.000		7.986.000		8.784.600	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tercapainya mutu pelayanan rumah sakit sesuai indikator standar pelayanan minimal	persentase capaian SPM di Rumah Sakit Mijen	Persen	100%	100%	6.000.000	100%	6.600.000	100%	7.260.000	100%	7.986.000	100%	8.784.600	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit					6.000.000		6.600.000		7.260.000		7.986.000		8.784.600	Staf Pelayanan Medik dan Keperawatan
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dok.	0	12	6.000.000	12	6.600.000	12	7.260.000	12	7.986.000	12	8.784.600	Staf Pelayanan Medik dan Keperawatan
1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5,037,000,000		5,540,700,000		6,094,770,000		6,704,247,000		7,374,671,700	Direktur RSUD Mijen
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Mijen yang berkualitas	Persen		100%	5,037,000,000	100%	5,540,700,000	100%	6,094,770,000	100%	6,704,247,000	100%	7,374,671,700	Direktur RSUD Mijen
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD Mijen	Persen		100%		100%		100%		100%		100%		Direktur RSUD Mijen
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		3.300.000		3.630.000		3.993.000		4.392.300	Kasubag Tata Usaha

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Mijen beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja RSUD Mijen yang sesuai peraturan perundangan	Persen	100%	100%	3.000.000	100%	3.300.000	100%	3.630.000	100%	3.993.000	100%	4.392.300	Kasubag Tata Usaha
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	Staf Tata Usaha
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Dok.	2	2	2.000.000	2	2.200.000	2	2.420.000	2	2.662.000	2	2.928.200	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.464.100	Staf Tata Usaha
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Laporan	12	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.210.000	12	1.331.000	12	1.464.100	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.900.000		6.490.000		7.139.000		7.852.900		8.638.190	Kasubag Tata Usaha
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan RSUD Mijen yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan RSUD Mijen yang sesuai	Persen	100%	100%	5.900.000	100%	6.490.000	100%	7.139.000	100%	7.852.900	100%	8.638.190	Kasubag Tata Usaha

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	peraturan perundangan													
1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.400.000		2.640.000		2.904.000		3.194.400		3.513.840	Staf Tata Usaha
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12	2.400.000	12	2.640.000	12	2.904.000	12	3.194.400	12	3.513.840	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.500.000		1.650.000		1.815.000		1.996.500		2.196.150	Staf Tata Usaha
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Laporan	4	4	1.500.000	4	1.650.000	4	1.815.000	4	1.996.500	4	2.196.150	Staf Tata Usaha

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Triwulanan / Semesteran SKPD													
1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	Staf Tata Usaha
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok.	2	2	2.000.000	2	2.200.000	2	2.420.000	2	2.662.000	2	2.928.200	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000		2.750.000		3.025.000		3.327.500		3.660.250	Kasubag Tata Usaha
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RSUD Mijen	Persentase pelayanan kepegawaian RSUD Mijen yang memenuhi prosedur dan sesuai standar	Persen	100%	100%	2.500.000	100%	2.750.000	100%	3.025.000	100%	3.327.500	100%	3.660.250	Kasubag Tata Usaha
1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2.500.000		2.750.000		3.025.000		3.327.500		3.660.250	Staf Tata Usaha
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok.	12	12	2.500.000	12	2.750.000	12	3.025.000	12	3.327.500	12	3.660.250	Staf Tata Usaha

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.200.000		1.320.000		1.452.000		1.597.200		1.756.920	Kasubag Tata Usaha
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD Mijen	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor RSUD Mijen	Persen	100%	100%	1.200.000	100%	1.320.000	100%	1.452.000	100%	1.597.200	100%	1.756.920	Kasubag Tata Usaha
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1.200.000		1.320.000		1.452.000		1.597.200		1.756.920	Staf Tata Usaha
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	1.200.000	12	1.320.000	12	1.452.000	12	1.597.200	12	1.756.920	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.000.000		4.400.000		4.840.000		5.324.000		5.856.400	Kasubag Tata Usaha
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD Mijen	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD Mijen		100%	100%	4.000.000	100%	4.400.000	100%	4.840.000	100%	5.324.000	100%	5.856.400	Kasubag Tata Usaha

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	Staf Tata Usaha
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	2.000.000	4	2.200.000	4	2.420.000	4	2.662.000	4	2.928.200	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	Staf Tata Usaha
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	2.000.000	4	2.200.000	4	2.420.000	4	2.662.000	4	2.928.200	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.400.000	100%	2.640.000	100%	2.904.000	100%	3.194.400	100%	3.513.840	Kasubag Tata Usaha
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada RSUD Mijen	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada RSUD Mijen yang selesai ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	2.400.000	100%	2.640.000	100%	2.904.000	100%	3.194.400	100%	3.513.840	Kasubag Tata Usaha

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.200.000		1.320.000		1.452.000		1.597.200		1.756.920	Staf Tata Usaha
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.200.000	12	1.320.000	12	1.452.000	12	1.597.200	12	1.756.920	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.200.000		1.320.000		1.452.000		1.597.200		1.756.920	Staf Tata Usaha
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.200.000	12	1.320.000	12	1.452.000	12	1.597.200	12	1.756.920	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.000.000		19.800.000		21.780.000		23.958.000		26.353.800	Kasubag Tata Usaha
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD Mijen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor	Persen	100%	100%	18.000.000	100%	19.800.000	100%	21.780.000	100%	23.958.000	100%	26.353.800	Kasubag Tata Usaha

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	RSUD Mijen sesuai ketentuan													
1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	Staf Tata Usaha
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.420.000	1	2.662.000	1	2.928.200	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000	Staf Tata Usaha
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	10.000.000	20	11.000.000	20	12.100.000	20	13.310.000	20	14.641.000	Staf Tata Usaha

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.000.000	4	2.200.000	4	2.420.000	4	2.662.000	4	2.928.200	Staf Tata Usaha
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	2.000.000	4	2.200.000	4	2.420.000	4	2.662.000	4	2.928.200	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	Staf Tata Usaha
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.420.000	1	2.662.000	1	2.928.200	Staf Tata Usaha
1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	Staf Tata Usaha
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.420.000	1	2.662.000	1	2.928.200	Staf Tata Usaha

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					5.000.000.000		5.500.000.000		6.050.000.000		6.655.000.000		7.320.500.000	Kasubag Tata Usaha
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD Mijen	Persen	100%	100%	5.000.000.000	100%	5.500.000.000	100%	6.050.000.000	100%	6.655.000.000	100%	7.320.500.000	Kasubag Tata Usaha
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					5.000.000.000		5.500.000.000		6.050.000.000		6.655.000.000		7.320.500.000	Staf Tata Usaha
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	5.000.000.000	1	5.500.000.000	1	6.050.000.000	1	6.655.000.000	1	7.320.500.000	Staf Tata Usaha
Sasaran 5: Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro	Net Death Rate (NDR) RSUD K.R.M.T Wongosnegoro	permil	28,5	27,5	51,685,590,644	27,05	57,153,700,011	26,5	59,533,675,730	26,05	59,970,843,450	25	61,002,031,750	Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					51.685.590.644						59.970.843.450		61.002.031.750	Wakil Direktur Pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegro
Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang sesuai	Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik di RSUD	Persen	100%	100%	51.685.590.644		0		0	100%	59.970.843.450	100%	61.002.031.750	Wakil Direktur Pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegro

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
standar di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	K.R.M.T Wongsonegoro													
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					51.685.590 .644						59.970.843. 450		61.002.031 .750	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
Terwujudnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase pemenuhan alat kesehatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro untuk upaya kesehatan perorangan sesuai rencana pengadaannya	Persen	100%	100%	51.685.590 .644		0		0	100%	59.970.843. 450	100%	61.002.031 .750	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					51.685.590 .644						59.970.843. 450		61.002.031. 750	Katimja Penunjang Medis
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	25 Unit	15 unit	51.685.590 .644	0 Unit		0 Unit		15 unit	59.970.843. 450	15 Unit	61.002.031. 750	Katimja Penunjang Medis

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							57.153.700.011		59.533.675.730					Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana prasarana RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dalam mendukung layanan kesehatan perorangan	Persentase tingkat penggunaan sarana prasarana sesuai standar	Persen	100%		0	100%	57.153.700.011	100%	59.533.675.730		0		0	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							57.153.700.011		59.533.675.730					Kepala Bagian Umum
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro	Persentase kesesuaian sarana prasarana yang digunakan dengan standar pelayanan kesehatan	Persen	100%		0	100%	57.153.700.011	100%	59.533.675.730		0		0	Kepala Bagian Umum
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit							57.153.700.011		59.533.675.730					Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
Tersedianya Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana,	Unit	2 Unit	-	0	1 Unit	57.153.700.011	1 Unit	59.533.675.730	-	0	-	0	Kepala Sub Bagian Umum

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000													dan Rumah Tangga
Sasaran 6: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan BLUD RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Angka	79,8	79,87	376,773,164,048	79,9	402,205,571,085	79,93	429,371,160,893	79,95	458,388,901,979	79,97	489,385,972,933	Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Angka	91,99	88,6		88,7		88,8		88,9		89		Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
1.02.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota					221,506,899,753		237,012,382,735		253,603,249,527		271,355,476,994		290,350,360,384	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang berkualitas	Persen	100%	100%	221,506,899,753	100%	237,012,382,735	100%	253,603,249,527	100%	271,355,476,994	100%	290,350,360,384	Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					388,790,000		416,005,300		445,125,671		476,284,468		509,624,380	Kepala Bagian Keuangan
Terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase temuan keuangan yang berhasil ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	388,790,000	100%	416,005,300	100%	445,125,671	100%	476,284,468	100%	509,624,380	Kepala Bagian Keuangan
	Rasio Kas RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persen	202%	80%		80%		80%		80%		80%		
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					228,950,000		244,976,500		262,124,855		280,473,595		300,106,746	Sub Bagian Akuntansi, Penyusunan Anggaran, dan BMD
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	228,950,000	1 Unit	244,976,500	1 Unit	262,124,855	1 Unit	280,473,595	1 Unit	300,106,746	Sub Bagian Akuntansi, Penyusunan Anggaran, dan BMD
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					159,840,000		171,028,800		183,000,816		195,810,873		209,517,634	Sub Koordinator Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	159,840,000	1 Unit	171,028,800	1 Unit	183,000,816	1 Unit	195,810,873	1 Unit	209,517,634	Sub Koordinator Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					3,667,695,271		3,924,433,940		4,199,144,316		4,493,084,418		4,807,600,327	Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang sesuai peraturan perundangan		100%	100%	3,667,695,271	100%	3,924,433,940	100%	4,199,144,316	100%	4,493,084,418	100%	4,807,600,327	Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3,667,695,271		3,924,433,940		4,199,144,316		4,493,084,418		4,807,600,327	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	3,667,695,271	1 Unit	3,924,433,940	1 Unit	4,199,144,316	1 Unit	4,493,084,418	1 Unit	4,807,600,327	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					1,220,830,000		1,306,288,100		1,397,728,267		1,495,569,246		1,600,259,093	Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi
Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pelayanan	Persentase kinerja pemasaran dan informasi		100%	100%	1,220,830,000	100%	1,306,288,100	100%	1,397,728,267	100%	1,495,569,246	100%	1,600,259,093	Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan pemasaran RSUD K.R.M.T Wongsonegoro														
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,220,830,000		1,306,288,100		1,397,728,267		1,495,569,246		1,600,259,093	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Informasi
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	1,220,830,000	1 Unit	1,306,288,100	1 Unit	1,397,728,267	1 Unit	1,495,569,246	1 Unit	1,600,259,093	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Informasi
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					176,291,325,735		188,631,718,536		201,835,938,834		215,964,454,552		231,081,966,371	Kepala Bagian Umum
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Nilai layanan kepegawaian RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		100%	100%	176,291,325,735	100%	188,631,718,536	100%	201,835,938,834	100%	215,964,454,552	100%	231,081,966,371	Kepala Bagian Umum
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					176,291,325,735		188,631,718,536		201,835,938,834		215,964,454,552		231,081,966,371	Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	176,291,325,735	1 Unit	188,631,718,536	1 Unit	201,835,938,834	1 Unit	215,964,454,552	1 Unit	231,081,966,371	Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					15,672,207,820		16,769,262,367		17,943,110,733		19,199,128,484		20,543,067,478	Kepala Bagian Umum
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		100%	100%	15,672,207,820	100%	16,769,262,367	100%	17,943,110,733	100%	19,199,128,484	100%	20,543,067,478	Kepala Bagian Umum
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					15,672,207,820		16,769,262,367		17,943,110,733		19,199,128,484		20,543,067,478	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	15,672,207,820	1 Unit	16,769,262,367	1 Unit	17,943,110,733	1 Unit	19,199,128,484	1 Unit	20,543,067,478	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					6,266,676,818		6,705,344,195		7,174,718,289		7,676,948,569		8,214,334,971	Kepala Bagian Umum
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		100%	100%	6,266,676,818	100%	6,705,344,195	100%	7,174,718,289	100%	7,676,948,569	100%	8,214,334,971	Kepala Bagian Umum

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					6,266,676,818		6,705,344,195		7,174,718,289		7,676,948,569		8,214,334,971	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	6,266,676,818	1 Unit	6,705,344,195	1 Unit	7,174,718,289	1 Unit	7,676,948,569	1 Unit	8,214,334,971	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					9,810,000,000		10,496,700,000		11,231,469,000		12,017,671,830		12,858,908,858	Kepala Bagian Umum
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang selesai ditindaklanjuti		100%	100%	9,810,000,000	100%	10,496,700,000	100%	11,231,469,000	100%	12,017,671,830	100%	12,858,908,858	Kepala Bagian Umum
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					9,810,000,000		10,496,700,000		11,231,469,000		12,017,671,830		12,858,908,858	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	9,810,000,000	1 Unit	10,496,700,000	1 Unit	11,231,469,000	1 Unit	12,017,671,830	1 Unit	12,858,908,858	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					8,189,374,109		8,762,630,297		9,376,014,417		10,032,335,427		10,734,598,906	Kepala Bagian Umum
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor RSUD K.R.M.T Wongsonegoro sesuai ketentuan		100%	100%	8,189,374,109	100%	8,762,630,297	100%	9,376,014,417	100%	10,032,335,427	100%	10,734,598,906	Kepala Bagian Umum
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					8,189,374,109		8,762,630,297		9,376,014,417		10,032,335,427		10,734,598,906	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	8,189,374,109	1 Unit	8,762,630,297	1 Unit	9,376,014,417	1 Unit	10,032,335,427	1 Unit	10,734,598,906	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
1.02.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota					108,180,542,010		115,753,179,951		123,855,902,547		132,525,815,725		141,802,622,826	Wakil Direktur Pelayanan
Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang	Persentase ketercapaian kinerja pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		100%	100%	108,180,542,010	100%	115,753,179,951	100%	123,855,902,547	100%	132,525,815,725	100%	141,802,622,826	Wakil Direktur Pelayanan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase ketercapai Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro		90%	90%		90%		90%		90%		90%		Wakil Direktur Pelayanan
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					98,612,015,409		105,514,856,488		112,900,896,442		120,803,959,192		129,260,236,336	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
Meningkatnya pelayanan medis dan penunjang medis yang berkualitas	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis		90%	90%	98,612,015,409	90%	105,514,856,488	90%	112,900,896,442	90%	120,803,959,192	90%	129,260,236,336	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					-		-		-		-		-	Ketua Tim Kerja Pelayanan Medis
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	Ketua Tim Kerja Pelayanan Medis
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					98,612,015,409		105,514,856,488		112,900,896,442		120,803,959,192		129,260,236,336	Ketua Tim Kerja Penunjang Medis

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 unit	1 unit	98,612,015,409	1 unit	105,514,856,488	1 unit	112,900,896,442	1 unit	120,803,959,192	1 unit	129,260,236,336	Ketua Tim Kerja Penunjang Medis
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					9.568.526.601		10.238.323.463		10.955.006.105		11.721.856.533		12.542.386.490	Kepala Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis
Meningkatnya pelayanan keperawatan, kebidanan dan penunjang non medis yang berkualitas	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis	Persen	90%	90%	9.568.526.601	90%	10.238.323.463	90%	10.955.006.105	90%	11.721.856.533	90%	12.542.386.490	Kepala Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					9.568.526.601		10.238.323.463		10.955.006.105		11.721.856.533		12.542.386.490	Ketua Tim Kerja Keperawatan dan Kebidanan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit	1 Unit	50,000,000	1 Unit	53,500,000	1 Unit	57,245,000	1 Unit	61,252,150	1 Unit	65,539,800	Ketua Tim Kerja Keperawatan dan Kebidanan
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					9,518,526,601		10,184,823,463		10,897,761,105		11,660,604,383		12,476,846,690	Ketua Tim Kerja Penunjang Non Medis

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 unit	1 unit	9,518,526,601	1 Unit	10,184,823,463	1 Unit	10,897,761,105	1 Unit	11,660,604,383	1 Unit	12,476,846,690	Ketua Tim Kerja Penunjang Non Medis

Tabel 4.4 Rencana Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Semarang

No	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	Keterangan					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pelayanan Kesehatan Labkes	1,756,920,000	2.001.649.278	2.141.764.728	2.291.688.259	2.452.106.437	2.623.753.887	Retribusi, dll
2	Pelayanan kesehatan Puskesmas	81,531,087,000	92.887.916.674	99.390.070.842	106.347.375.800	113.791.692.107	121.757.110.554	Retribusi, Kapitasi, dll
3	Pelayanan RSUD Mijen	0	5,000,000,000	5,500,000,000	6,050,000,000	6,655,000,000	7,320,500,000	Retribusi, dll
4	Pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	331.935.007.242	329.687.441.763	352.765.562.686	377.459.152.074	403.881.292.719	432.152.983.210	Retribusi, dll
	TOTAL	415.223.014.242	429.577.007.715	459.797.398.256	492.148.216.133	526.780.091.263	563.854.347.651	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah kematian Ibu	kasus	13	13	13	12	12	12	Dinas Kesehatan
2	Angka kematian balita	Per 1000 KH	9,02	8,97	8,91	8,85	8,79	8,74	Dinas Kesehatan
3	Persentase penurunan kasus stunting EPPBGM	%	0,7	0.6	0,5	0,4	0,3	0,2	Dinas Kesehatan
4	Angka populasi bebas penyakit menular	Angka	71	72	78	81	83	90	Dinas Kesehatan
5	Angka populasi bebas penyakit tidak menular	Angka	50	52	54	56	58	60	Dinas Kesehatan
6	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	40%	60%	70%	80%	90%	100%	Dinas Kesehatan
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
8	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	Rasio	6,25	6,29	6,33	6,37	6,41	6,45	Dinas Kesehatan
9	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	80	82	84	86	88	90	Dinas Kesehatan
10	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk	%	1,13	10,17	20,34	24,86	29,38	39,55	Dinas Kesehatan

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	meningkatkan aktivitas fisik								
11	*Net death rate (NDR)* RSUD Mijen	Permil	35	33	30	28	26	24	RSUD Mijen
12	*Net death rate (NDR)* RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Permil	28,05	27,5	27,05	26,5	26,05	25	RSUD K.R.M.T Wongsonegoro

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	99,21	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	74,71	68,96	63,21	57,47	57,47	57,47	Dinas Kesehatan
16	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	7,93	7,87	7,82	7,76	7,7	7,64	Dinas Kesehatan
17	Angka Kematian Balita	per 1000 kelahiran hidup	9,02	8,97	8,91	8,85	8,79	8,74	Dinas Kesehatan
18	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	95,00	Dinas Kesehatan
19	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	13	13	12	12	12	Dinas Kesehatan

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,64	8,88	7,72	6,56	5,4	5,16	Dinas Kesehatan
21	Angka kberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate)*	%	90	90,5	91	91,5	92	92,5	Dinas Kesehatan
22	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	90	90,5	91	91,5	92	92,5	Dinas Kesehatan
23	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
24	*Net Death Rate (NDR)* RSUD Mijen	Permil	35	33	30	28	26	24	RSUD Mijen
25	*Net Death Rate (NDR)* RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Permil	28,05	27,5	27,05	26,5	26,05	25	RSUD K.R.M.T Wongsonegoro

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi, serta arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, baik dalam lingkup pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Kesehatan telah mengacu pada RPJMD Kota Semarang dan selanjutnya akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah, terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya dalam penyediaan pelayanan yang merata, berkualitas, serta upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, merupakan isu yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Kesehatan secara mandiri. Oleh karena itu, langkah strategis pertama yang akan ditempuh adalah melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, dilakukan penguatan komitmen dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, masyarakat, maupun dunia usaha di tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Dengan sinergi yang baik, seluruh potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan kesehatan yang terpadu, efektif, dan efisien.

Pencapaian target sasaran pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Renstra ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan melalui semangat, dedikasi, tanggung jawab, dan kerja keras yang berkesinambungan. Keberhasilan setiap unit kerja akan dinilai dari capaian kinerja kegiatan yang menjadi mandat dan tanggung jawabnya. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, serta dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai, Dinas Kesehatan diharapkan mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.Pada akhirnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sekaligus mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang yang setinggi-tingginya.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula dalam pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat pada masa lalu sehingga dapat diantisipasi dan ditingkatkan pada masa depan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi salah satu instrumen pertanggungjawaban kinerja publik. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, menjadi dasar hukum bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk menyusun dokumen RENSTRA yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang. Atas dasar tersebut, RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya di bidang pekerjaan umum, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama periode 2021–2026, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang telah mencapai berbagai kemajuan, antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan kota, rehabilitasi dan pembangunan jembatan, penguatan sistem drainase untuk mengurangi genangan, serta penataan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah. Capaian ini berdampak pada kelancaran mobilitas, konektivitas antarwilayah, peningkatan akses layanan publik, serta memperkuat ketahanan kota menghadapi tantangan perubahan iklim.

Meskipun demikian, tantangan pembangunan infrastruktur masih signifikan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran, serta fenomena banjir, genangan, dan penurunan muka tanah memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program serta pendayagunaan aparatur, dan agar mampu eksis serta unggul dalam

lingkungan yang berubah dengan cepat dewasa ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai organisasi harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang periode 2025–2029.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025–2029 dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 94);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, baik di tingkat bidang, sekretariat, maupun UPTD, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, serta Bidang Pendayagunaan Infrastruktur.

Penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan persiapan yang mencakup peninjauan kinerja periode sebelumnya, pemetaan tugas dan fungsi ke dalam struktur kinerja (cascading), serta identifikasi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi. Hasil tahapan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan yang terarah dan selaras dengan visi pembangunan Kota Semarang lima tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029, khususnya pada bidang pekerjaan umum;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;
4. Menjadi dasar evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dalam kurun waktu lima tahun; dan
5. Memberikan gambaran umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada periode sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan, permasalahan, dan isu strategis untuk lima tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renstra ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota Semarang periode 2025–2029, terutama dalam menciptakan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Renstra ini menjadi komitmen bersama untuk mengarahkan setiap langkah, memastikan keterpaduan antarprogram, serta menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Selain itu, memuat permasalahan dan isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis, dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi uraian program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilengkapi dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, serta lokasi pelaksanaan (lokus). Bab ini juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, termasuk kondisi awal dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Rekayasa Teknis, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase, serta Pendayagunaan Infrastruktur;
b. Perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Wali Kota;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Rekayasa Teknis, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase, Pendayagunaan Infrastruktur, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
e. Penyelenggaraan kerja sama di bidang Rekayasa Teknis, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase, serta Pendayagunaan Infrastruktur;
f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
g. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Rekayasa Teknis, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase, Pendayagunaan Infrastruktur, dan UPTD;
h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di seluruh bidang dan UPTD;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang juga mengatur terkait susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
    3) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
c. Bidang Rekayasa Teknis, terdiri atas:
    1) Subkoordinator Survei dan Pengukuran
    2) Subkoordinator Perancangan Teknis; dan
    3) Subkoordinator Pengembangan Teknologi Infrastruktur.
d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
    1) Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    2) Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

3) Subkoordinator Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.

e. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri atas:
   1) Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
   2) Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase; dan
   3) Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air.
f. Bidang Pendayagunaan Infrastruktur, terdiri atas:
   1) Subkoordinator Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
   2) Subkoordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
   3) Subkoordinator Penyiapan Lahan.
g. UPTD, dan
h. Jabatan Fungsional

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

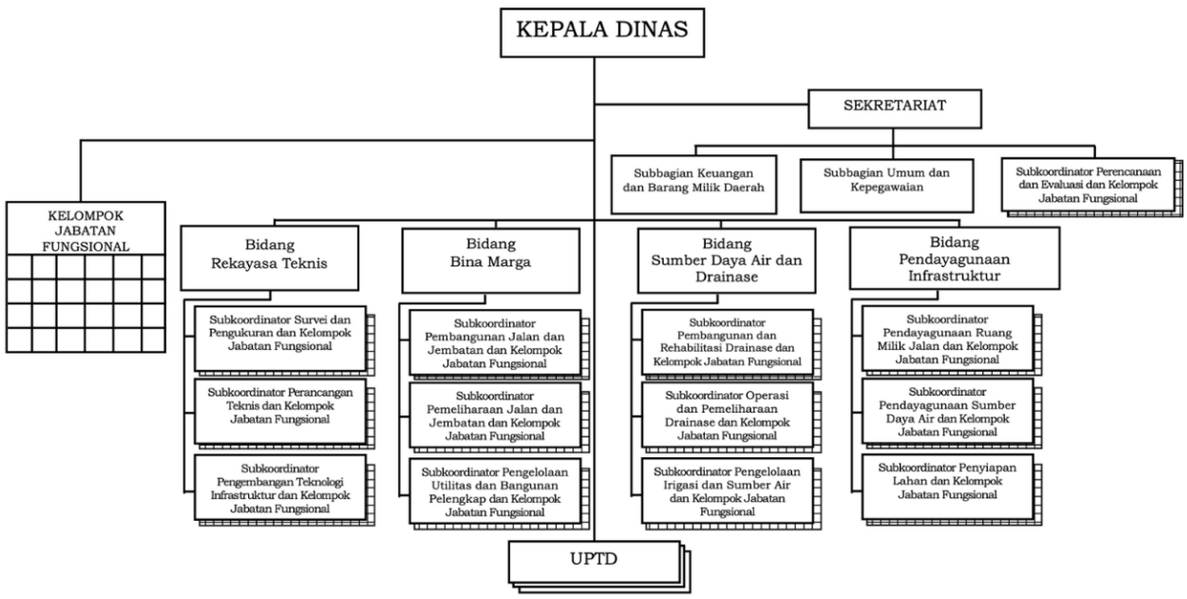

Sumber: Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 Tahun 2021

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki tugas : merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

b) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD. Selain itu, sekretariat memiliki tugas tambahan sebagai koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
4. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
5. pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Dinas;
7. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
8. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
9. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
10. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
12. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
13. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
14. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
15. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
16. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
17. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
18. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
19. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
20. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
21. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
22. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
23. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
24. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
25. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
26. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi.

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
6. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
7. menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
8. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
9. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
10. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Dinas;
11. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
12. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

5. menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
6. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
7. menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
8. menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
9. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
10. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
11. menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
12. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
13. menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
14. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
15. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
16. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
17. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
5. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
6. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
7. menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;

9. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
10. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
11. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
12. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

a) Bidang Rekayasa Teknis

Bidang Rekayasa Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Survei dan Pengukuran, Seksi Perancangan Teknis, dan Seksi Pengembangan Teknologi Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rekayasa Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Rekayasa Teknis;
5. pelaksanaan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan bina marga, sumber daya air dan drainase;
6. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data teknis bina marga, sumber daya air dan drainase;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis bina marga, sumber daya air, drainase dan sarana pendukungnya;
8. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan evaluasi dan justifikasi teknis;
9. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
10. pelaksanaan kegiatan kajian penerapan aplikasi teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
12. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Rekayasa Teknis;
14. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Rekayasa Teknis;
15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rekayasa Teknis terdiri atas Subkoordinator Survei dan Pengukuran, Subkoordinator Perancangan Teknis, dan Subkoordinator Pengembangan Teknologi Infrastruktur.

Subkoordinator Survei dan Pengukuran mempunyai tugas :

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Survei dan Pengukuran;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Survei dan Pengukuran;
5. menyiapkan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan bina marga, sumber daya air dan drainase;
6. menyiapkan kegiatan pengelolaan data teknis bina marga, sumber daya air dan drainase;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Survei dan Pengukuran;
8. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Survei dan Pengukuran;
9. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Survei dan Pengukuran;
10. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Perancangan Teknis mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perancangan Teknis;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perancangan Teknis;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis bina marga, sumber daya air, drainase dan sarana pendukungnya;
6. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan evaluasi dan justifikasi teknis;
7. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perancangan Teknis;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perancangan Teknis;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perancangan Teknis;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pengembangan Teknologi Infrastruktur mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Teknologi Infrastruktur;

2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengembangan Teknologi Infrastruktur;
5. menyiapkan kegiatan kajian penerapan aplikasi teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
6. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
7. menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengembangan Teknologi Infrastruktur;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengembangan Teknologi Infrastruktur;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Infrastruktur;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Bina Marga;
5. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
6. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan peningkatan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
7. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan, jembatan, dan kelengkapannya;
8. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya;
9. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penilikan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya;
10. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan;
11. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
12. pelaksanaan kegiatan pengaturan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;

13. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
14. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Bina Marga;
15. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Bina Marga;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga terdiri atas Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan, Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta Subkoordinator Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.

Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
5. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
6. menyiapkan kegiatan pelaksanaan peningkatan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan, jembatan, dan kelengkapannya;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya;
6. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penilikan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya;

7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkooridnator Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
5. menyiapkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
6. menyiapkan kegiatan pengaturan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengeveluasi Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase, dan Seksi Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:
1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
5. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase;
6. pelaksanaan kegiatan pengaturan sistem drainase;
7. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sistem drainase;
8. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat sarana dan prasarana drainase;
9. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasi drainase;
10. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan sumber air antara lain bendung, embung, kolam retensi, polder, sumur air baku dan bangunan pengawetan air tanah;
11. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
12. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian jaringan irigasi dan sumber air;
13. pelaksanaan kegiatan pengamanan aset jaringan irigasi primer dan sekunder;
14. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
15. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase terdiri atas Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase, Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase; serta Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air.

Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
5. menyiapkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase;
6. menyiapkan kegiatan pengaturan sistem drainase;
7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sistem drainase;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;

10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
5. menyiapkan kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat sarana dan prasarana drainase;
6. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasi drainase;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
8. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuanga Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
9. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
10. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaa Irigasi dan Sumber Air;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air;
5. menyiapkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan Irigasi dan Sumber Air antara lain bendung, embung, kolam retensi, polder, sumur air baku dan bangunan pengawetan air tanah;
6. menyiapkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian jaringan irigasi dan sumber air;
8. menyiapkan kegiatan pengamanan aset jaringan irigasi primer dan sekunder;
9. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air;

10. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air;
11. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air;
12. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d) Bidang Pendayagunaan Infrastruktur

Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan, Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Seksi Penyiapan Lahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur mempunyai fungsi:

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan di bidang pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan, penataan, dan kerja sama di bidang pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
7. pelaksanaan kegiatan pengamanan ruang milik jalan;
8. pelaksanaan kegiatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan, penataan, dan kerja sama di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
10. pelaksanaan kegiatan pengamanan di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
11. pelaksanaan kegiatan perencanaan, persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian penyiapan lahan;
12. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pencatatan aset lahan;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan guna pemanfaatan lahan;
14. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
15. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pendayagunaan Infrastruktur terdiri atas Subkoordinator Pendayagunaan Ruang Milik Jalan, Subkoordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air; serta Subkoordinator Penyiapan Lahan.

Subkoordinator Pendayagunaan Ruang Milik Jalan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan
6. pemeliharaan di bidang pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan, penataan, dan kerja sama di bidang pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
8. menyiapkan kegiatan pengamanan ruang milik jalan;
9. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
10. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;\
11. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
12. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendayagunaan Sumber Daya Air;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
6. menyiapkan kegiatan penyusunan, penataan, dan kerja sama di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
7. menyiapkan kegiatan pengamanan di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendayagunaan Sumber Daya Air;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Penyiapan Lahan mempunyai tugas:
1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyiapan Lahan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Penyiapan Lahan;

5. menyiapkan kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian penyiapan lahan;
6. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pencatatan aset lahan;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan guna pemanfaatan lahan;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Penyiapan Lahan;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Penyiapan Lahan;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyiapan Lahan;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan aset penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Jumlah dan kualitas pegawai yang dimiliki menjadi faktor penentu dalam peningkatan kinerja pelayanan publik, khususnya di bidang rekayasa teknis, bina marga, sumber daya air dan drainase, serta pendayagunaan infrastruktur.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	PNS	105	17,26
2	PPPK	357	58,71
3	Non-ASN	146	24,03
	Total	608	100%

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	6	0	6
1	SMP Sederajat	1	0	19	0	20
2	SMA Sederajat	16	1	165	14	196
3	D3	9	6	10	8	33
4	D4	1	0	0	0	1
4	S1	46	15	100	35	196
5	S2	9	1	0	0	10
6	S3	0	0	0	0	0

Dari jumlah pegawai sebanyak 462 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	16	6	22
2	Golongan III	61	17	78
3	Golongan IV	5	0	5

Tabel 2.4.
Sebaran Pegawai Berdasarkan Unit Kerja/Bidang
di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Unit Kerja/Bidang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sekretariat	39	7.93
2	Bidang Rekayasa Teknis	23	4.68
3	Bidang Bina Marga	24	4.88
4	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	64	13.01
5	Bidang Pendayagunaan Infrastruktur	24	4.88
6	UPTD	283	57.62
	Total	491	100

b. Sarana Prasarana

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, meliputi gedung kantor, gudang, peralatan kerja, kendaraan dinas, dan perangkat teknologi informasi:

Tabel 2.5.
Daftar Sarana dan Prasarana
di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi (Baik/Sedang/Rusak Ringan/Rusak Berat)	Keterangan
1	Gedung Kantor	110	Baik	
2	Kendaraan Dinas	197	Baik	
3	Alat Berat (Excavator, Loader, dsb.)	134	Baik	
4	Perangkat Komputer	435	Baik	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mencerminkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum, yang meliputi rekayasa teknis, bina marga, sumber daya air dan drainase, serta pendayagunaan infrastruktur. Evaluasi kinerja ini didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra sebelumnya dan selaras dengan indikator kinerja daerah (IKD) di RPJMD Kota Semarang.4

a. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DPU Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	INDIKATOR KINERJA DAERAH																		
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (%)	Persen	-	-	NA	93,74	95,61	96,17	96,78	NA	94,60	96,52	96,57	96,57	NA	100,92	100,95	100,42	99,78
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS (%)	Persen	-	-	NA	97,25	98,64	99,17	99,41	NA	97,25	97,25	97,25	97,25	NA	100,00	98,59	98,06	97,83
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	Persen	-	-	NA	80,64	81,80	83,00	84,20	NA	80,64	81,80	83,00	84,20	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	-	-	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	90,42% (759,42 km)	92,38% (775,88 km)	92,52% (778,12 km)	93,004 % (781,14 1 km)	93,273 % (783,40 4 km)	98,28	99,87	99,48	99,47	99,22
	Persentase luas sawah beririgasi (%)	Persen	-	-	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	65,43	100,00	100,00	100,00	100,00	152,16

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	Persen	-	-	NA	82,5	82,5	82,5	82,5	80	82,5	82,5	82,5	82,5	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase kawasan banjir dan rob (%)	Persen	-	-	3,73	3,40	3,50	3,32	3,19	1,30 (Hanya jalan dan permukiman)	2,7 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)	1,74 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)	1,715	1,645	286,92	125,93	201,15	193,59	193,92
	Persentase kawasan banjir (%)	Persen	-	-	3,73	3,40	3,02	2,64	2,26	3,73	3,4	2,37	2,34	2,23	100,00	100,00	127,43	112,82	101,35
	Persentase kawasan rob (%)	Persen	-	-	2,00	2,00	1,85	1,65	1,45	2	2	1,11	1,09	1,06	100,00	100,00	166,67	151,38	136,79
	Indikator kinerja Utama (IKU)																		
	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	-	-	NA	NA	53	68	73	NA	NA	53,98	69,13	73,70	NA	NA	101,85	101,66	100,96
	a) Persentase Kawasan banjir	Persen	-	-	3,73	3,40	3,02	2,64	2,26	3,73	3,4	2,37	2,34	2,23	100,00	100,00	127,43	112,82	101,35
	b) Persentase Kawasan rob	Persen	-	-	2,00	2,00	1,85	1,65	1,45	2	2	1,11	1,09	1,06	100,00	100,00	166,67	151,38	136,79
	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persen	-	-	74,13	74,50	74,90	75,30	75,75	74,13	74,50	89,502	89,72	90,51	100,00	100,00	119,5	119,16	119,49
	a) Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	-	-	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	90,42% (759,42 km)	92,38% (775,88 km)	92,52% (778,12 km)	93,004 % (781,14 1 km)	93,273 % (783,40 4 km)	100,41	100,02	100,0	99,75	99,22
	b) Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	-	-	55,75	56,00	56,30	56,60	57,00	55,75	86,45	86,45	86,00	91,90	100,00	153,55	153,55	151,94	161,22

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
	c)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-	-	NA	NA	75,10	75,40	77,20	NA	NA	74,80	77,05	77,35	NA	NA	100,4	103,01	103,0

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.677.878.800	32.312.416.520	31.740.116.478	38.007.599.944	107.120.035.673	13.801.271.468	29.598.207.344	30.585.407.930	34.827.605.696	77.492.774.877	94,03	91,60	96,36	91,63	72,34	327,32	63,54
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32.189.366	42.000.000	42.000.000	81.395.627		29.103.360	41.722.250	31.887.270	66.098.400		90,41	99,34	75,92	81,21	33,14	26,66
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18.711.650.566	16.742.491.534	16.959.575.957	18.156.200.000		17.809.320.439	16.095.178.955	16.368.699.174	17.572.563.152		95,18	96,13	96,51	96,79	-1,04	-0,69
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.423.693.940	1.887.520.444	4.168.243.483	4.441.398.723		1.165.881.325	1.717.999.680	3.855.508.518	3.834.831.657		81,89	91,02	92,49	86,34	186,14	45,72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		105.143.045	226.557.410	211.871.839	425.517.479		90.050.400	150.583.100	159.755.217	370.449.812		85,65	66,47	75,40	87,06	41,72	52,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.030.698.840	10.088.933.271	13.418.032.865	14.250.248.617		7.944.984.154	9.875.398.604	11.882.800.374	12.707.702.032		87,98	97,88	88,55	89,18	15,11	17,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.009.040.763	2.734.847.839	3.187.875.800	69.744.175.227		2.558.867.666	2.697.185.091	2.517.474.393	42.925.062.824		85,04	98,62	78,97	61,42	47,88	56,22

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.749.869.000	29.073.655.897	25.834.082.945	32.352.188.964	45.885.383.876	25.431.206.946	25.595.877.901	23.895.488.277	26.471.883.971	40.279.986.155	98,76	88,04	92,50	81,82	87,78	24,71	20,16
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		24.559.528.060	23.121.624.810	28.162.558.070	41.835.767.294		21.313.155.763	21.227.716.708	23.255.092.480	36.550.802.269		86,78	91,81	82,57	87,34	17,91	19,55
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.514.127.837	2.712.458.135	4.189.630.894	4.049.616.582		4.282.722.138	2.667.771.569	3.216.791.491	3.729.183.886		94,87	98,35	76,77	91,86	-2,76	-3,62
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.576.754.000	71.559.936.169	86.837.138.645	95.442.631.101	127.238.911.850	11.496.290.840	61.963.119.484	77.710.215.107	81.341.491.013	108.481.944.340	99,30	86,59	89,49	85,23	85,26	36,57	12,56
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		71.559.936.169	86.837.138.645	42.347.800.637	127.238.911.850		61.963.119.484	77.710.215.107	34.134.787.090	108.481.944.340		86,59	89,49	80,60	85,26	36,57	12,56

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	104.766.989.200	249.642.571.208	263.377.801.007	277.594.189.984	173.696.933.678	97.828.034.707	148.687.072.240	243.130.657.915	234.788.813.655	162.008.108.697	93,38	59,56	92,31	84,58	93,27	241,35	353,99
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		249.642.571.208	263.377.801.007	232.318.219.987	173.696.933.678		148.687.072.240	243.130.657.915	202.075.278.935	162.008.108.697		59,56	92,31	86,98	93,27	-14,74	22,85

c. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan pihak internasional, provinsi, maupun lembaga mitra. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas dukungan teknis, serta mendorong inovasi pengelolaan infrastruktur perkotaan.

Pertama, melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, World Bank, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat ketahanan kota terhadap risiko banjir dan rob. Program ini berbentuk pinjaman luar negeri (loan) melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Lokus pekerjaan yang direncanakan antara lain normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (tahun 2025 senilai Rp 682,3 miliar), Sub-Sistem Tenggang–Sodor (tahun 2025 senilai Rp 333 miliar), Sungai Semarang, Asin, dan Baru (tahun 2027 senilai Rp 80,1 miliar), serta Sungai Silandak (tahun 2027 senilai Rp 213 miliar). Ruang lingkup pekerjaan mencakup normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta pembangunan tampungan air berupa kolam retensi dan embung. Seluruh rangkaian pekerjaan ini ditujukan untuk mengurangi risiko banjir dan rob di kawasan rawan Kota Semarang yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah.

Kedua, kerja sama Develop to Build (D2B) dilaksanakan melalui kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Dalam program *Semarang Urban Flood Resilience Project* peserta dari Invest International Public Programmes B.V memberikan dukungan dalam bentuk dana hibah untuk studi dan perencanaan intervensi pengendalian banjir kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang juga memperoleh dukungan teknis dan pendanaan melalui skema ini. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang telah mengajukan permohonan kewajiban penyediaan lahan untuk kolam retensi. Lokus pekerjaan fisik direncanakan mencakup Rekondisi Kartini Drain (Rp 218,4 miliar) dan Rehabilitasi Saluran Sabuk Lateral Kanal (Rp 25,2 miliar). Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas rehabilitasi saluran drainase, penguatan sistem aliran, serta optimalisasi sistem pengendalian genangan di wilayah kota yang rentan terhadap hujan intensitas tinggi.

Ketiga, kerja sama Blue Deal Indonesia merupakan bentuk kolaborasi internasional antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang aktif dalam program ini, dengan fokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan air perkotaan, pengendalian banjir, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui Blue Deal, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memperoleh dukungan dalam bentuk pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk pengelolaan air perkotaan dan drainase. Program ini menjadi ruang strategis bagi Kota Semarang untuk memperkuat peran internasional sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan banjir dan rob.

Ketiga bentuk kerja sama tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam jejaring kerja sama lintas daerah, nasional, dan internasional. Kolaborasi ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya tahan infrastruktur Kota Semarang dalam menghadapi tantangan banjir, rob, drainase, dan keterbatasan sumber daya air.

Lebih lanjut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang juga berperan dalam mendukung pencapaian program lintas sektor, seperti *Kota Layak Anak* dan *Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana publik yang ramah anak, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di sekitar fasilitas Posyandu, dan penataan lingkungan yang aman dan inklusif. Sinergi dengan perangkat daerah terkait diarahkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi fungsi teknis, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan layanan dasar di tingkat kelurahan.

Dengan demikian, kerja sama yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum tidak hanya berfokus pada pengendalian banjir dan peningkatan infrastruktur, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan sosial Kota Semarang. Hal ini menegaskan posisi Dinas Pekerjaan Umum sebagai institusi yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan anak-anak.

d. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik serta menjawab tantangan infrastruktur perkotaan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang telah mengembangkan sejumlah inovasi yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Inovasi ini lahir dari kebutuhan lapangan sekaligus komitmen untuk menghadirkan solusi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pertama, inovasi SILAPPU (Sistem Informasi Laboratorium & Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang). Sistem ini dikembangkan sebagai layanan digital yang memudahkan masyarakat maupun pelaku jasa konstruksi dalam mengajukan permohonan pengujian material di UPTD Laboratorium dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Melalui SILAPPU, masyarakat dapat mengajukan pengujian terhadap berbagai jenis material konstruksi seperti aspal, beton, paving, tanah, agregat halus, agregat kasar, dan besi. Inovasi ini tidak hanya mempermudah akses layanan, tetapi juga meningkatkan transparansi, kecepatan pelayanan, serta akuntabilitas hasil pengujian material yang sangat penting untuk menjamin mutu pekerjaan konstruksi di Kota Semarang.

Kedua, inovasi Pipa Resap Horizontal (PRH) sebagai upaya konservasi air tanah sekaligus mitigasi genangan dan banjir di kawasan perkotaan. Teknologi ini memanfaatkan pipa yang dipasang secara horizontal di bawah permukaan tanah untuk memperbesar infiltrasi air hujan ke dalam lapisan tanah. Dengan penerapan PRH, limpasan air permukaan dapat ditekan sehingga risiko genangan dan beban saluran drainase berkurang. Selain

itu, teknologi ini mendukung konservasi air tanah dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait air bersih dan sanitasi, kota berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, serta pemulihan fungsi ekosistem daratan. Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mulai mengimplementasikan PRH di 53 titik di wilayah Kecamatan Gajahmungkur yang termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Banjir Kanal Barat dan DAS Kali Semarang. Hasil implementasi ini terbukti mampu mereduksi aliran air permukaan, memperkuat adaptasi kota terhadap intensitas hujan tinggi, serta menjadi bagian dari solusi berbasis alam (nature-based solution) dalam pengelolaan sumber daya air perkotaan.

Kedua inovasi ini menggambarkan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, melainkan juga melakukan transformasi dalam tata kelola layanan publik serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. SILAPPU memperkuat aspek pelayanan publik berbasis digital, sedangkan Pipa Resap Horizontal menghadirkan solusi teknis yang ramah lingkungan untuk pengendalian banjir dan konservasi air. Dengan demikian, inovasi yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berkontribusi nyata dalam membangun kota yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur yang selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Dalam lima tahun ke depan, dinamika kebijakan pemerintahan, perkembangan pesat wilayah perkotaan, serta kompleksitas kondisi sosial dan lingkungan akan mempengaruhi arah dan capaian pembangunan. Oleh karena itu, identifikasi tantangan dan peluang menjadi langkah penting untuk memastikan strategi yang tepat dan berkelanjutan.:

a. Tantangan

Berdasarkan permasalahan pokok pembangunan jangka menengah serta perkembangan kebutuhan masyarakat, tantangan utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang meliputi:

1) Dampak perubahan iklim meningkatkan frekuensi banjir dan rob yang sulit diprediksi.
2) Kebutuhan akan sistem pengelolaan banjir yang lebih canggih untuk mempercepat penanganan
3) Pesatnya pertumbuhan Kota Semarang memerlukan kapasitas jalan dan jembatan yang lebih besar, terutama di kawasan strategis.
4) Dibutuhkan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air.
5) Pentingnya pengembangan akses pedestrian yang ramah difabel, lansia, dan anak-anak untuk menciptakan lingkungan kota yang inklusif.
6) Masih adanya kawasan miskin yang kurang terjangkau infrastruktur memadai untuk mendukung pendidikan dan perekonomian lokal.

b. Peluang

Di sisi lain, sejumlah peluang strategis dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan tersebut:

1) Perkembangan teknologi informatika memberikan peluang untuk mengimplementasikan *smart infrastructure*,
2) Adanya peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air mendukung program pembangunan yang lebih terarah.
3) Pelebaran jalan dan pembangunan jembatan di kawasan strategis dapat meningkatkan daya saing Kota Semarang di tingkat regional dan nasional.
4) Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga infrastruktur kota menciptakan lingkungan yang lebih terawat dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan tantangan dan peluang ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dapat merumuskan kebijakan dan program yang responsif, inovatif, dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pekerjaan umum.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yaitu: “Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Rumusan Permasalahan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

No	Bidang	Permasalahan	Akar Permasalahan
	Rekayasa Teknis	- Kurangnya dukungan teknologi modern dan terintegrasi - Keterbatasan kapasitas SDM untuk inovasi	- Keterbatasan data geospasial terkini - Minimnya penggunaan teknologi modern - Integrasi perencanaan dengan kebutuhan wilayah kurang optimal - Keterbatasan standar teknis sesuai kebutuhan daerah - Minim inovasi dalam desain perencanaan

No	Bidang	Permasalahan	Akar Permasalahan
			- Keterbatasan sarana dan prasarana - Belum optimalnya kolaborasi dengan akademisi dan pihak swasta
	Bina Marga	- Keterbatasan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap - Kurangnya pengawasan dan pengelolaan utilitas	- Sarana dan prasarana kebinamargaan kurang memadai - Data perencanaan terbatas - Pengawasan konstruksi belum optimal (berpengaruh pada daya tahan jalan) - Minim bangunan pelengkap (saluran, dinding penahan, rambu lalu lintas) - Pengelolaan utilitas jalan sering mengganggu fungsi jalan
	Sumber Daya Air dan Drainase	- Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas sistem drainase - Keterbatasan pengelolaan dan penyediaan sumber daya air	- Luasnya genangan banjir dan rob akibat kapasitas drainase tidak mencukupi - Sarana dan prasarana drainase kurang memadai - Belum ada sistem pemantauan kinerja drainase yang teratur - Operasi dan pemeliharaan drainase belum optimal (SDM & alat terbatas) - Pelestarian sumber air belum maksimal - Sarana pemenuhan kebutuhan air irigasi masih kurang memadai
	Pendayagunaan Infrastruktur	- Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum - Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air dan ruang	- Pengelolaan ruang milik jalan tumpang tindih dengan infrastruktur lain - Kurangnya *street furniture* dan kantong parkir untuk pejalan kaki - Peningkatan banjir dan rob akibat belum optimalnya sistem drainase - Pengelolaan air kurang terkoordinasi dengan tata ruang - Keterbatasan lahan fasilitas umum di daerah padat penduduk - Kurangnya koordinasi dalam penyiapan lahan proyek infrastruktur
	Kesekretariatan	- Belum optimalnya penyelenggaraan fungsi kelembagaan	- Kurangnya kesadaran pegawai menerapkan prosedur administrasi yang efisien dan transparan - Minim pelatihan peningkatan kompetensi administratif

No	Bidang	Permasalahan	Akar Permasalahan
			- Rendahnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan barang milik daerah - Pelaporan dan pencatatan keuangan belum optimal sesuai standar - Manajemen kinerja pegawai belum maksimal - Kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahap awal pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi pedoman nasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah, termasuk perangkat daerah. Dokumen ini menekankan delapan prioritas nasional (Asta Cita), di mana dua di antaranya memiliki relevansi langsung dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu Prioritas 3 "Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi."

Dalam konteks pembangunan Kota Semarang, prioritas nasional tersebut selaras dengan tantangan yang dihadapi daerah, terutama terkait peningkatan ancaman banjir dan rob, penurunan muka tanah, serta kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Pembangunan sistem drainase, rumah pompa, kolam retensi, serta rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan merupakan kontribusi nyata Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk mendukung agenda nasional penguatan infrastruktur yang tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Lebih jauh, infrastruktur berkelanjutan yang dibangun oleh Dinas PU berperan dalam mendukung pencapaian sasaran nasional RPJMN 2025–2029, antara lain menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 2025–2029 tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya nasional mewujudkan Indonesia Emas 2045.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting

karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang pekerjaan umum, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan, melalui indikator tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah.
- Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah Menurunnya kawasan banjir dan rob, melalui indikator persentase kawasan banjir dan rob.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai 2 (dua) indikator tersebut di atas.

c. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari pencapaian Visi Indonesia Maju dan menjadi fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045. Visi Kementerian PU terumuskan sebagai: *"Terwujudnya Indonesia Maju melalui penyelenggaraan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan"*, di mana Kementerian PU berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada efisiensi investasi dan pengentasan kemiskinan.

Dari rangkaian sasaran strategis kementerian ini muncul tiga pilar utama yang sangat relevan dengan ruang lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang:

1. Efisiensi investasi, termasuk penurunan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* di bawah 6 angka.
2. Pengentasan kemiskinan secara signifikan hingga mendekati 0%.
3. Dorongan pertumbuhan ekonomi dengan target pertumbuhan nasional sekitar 8% pada 2029

Lebih lanjut, Renstra Kementerian PU juga memetakan capaian output sektoral yang mendukung infrastruktur strategis, seperti pembangunan bendungan, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangunan jalan baru; sejumlah komponen kunci yang secara langsung mendukung ketahanan dan efisiensi pembangunan.

Dalam konteks Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran strategis menyediakan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan, menanggapi tantangan lokal seperti banjir/rob, penurunan muka tanah, dan ketahanan pembangunan. Telaahan terhadap Renstra Kementerian PU mendukung hal ini melalui:

- Penekanan pada infrastruktur berkelanjutan, yang memperkuat peran DPU dalam membangun sistem drainase, pompa, dan kolam retensi sebagai adaptasi terhadap perubahan iklim.
- Fokus efisiensi investasi yang relevan bagi program rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur kota, agar komponen teknis dan anggaran dapat digunakan secara optimal.
- Kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan lokal melalui infrastruktur publik—seperti akses air, pengendalian banjir, dan konektivitas jalan—yang mendukung aktivitas ekonomi dan kualitas hidup warga.

d. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 yang disusun untuk mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045", maka tujuan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kualitas jalan provinsi serta meningkatkan kualitas pelayanan keciptakaryaan. Sasaran yang ditetapkan meliputi bertambahnya panjang jalan provinsi yang sesuai standar, terjaganya kondisi jalan mantap, meningkatnya akses air minum dan sanitasi aman, serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah.

Program strategis yang dijalankan antara lain pelebaran dan rehabilitasi jalan, pemeliharaan jembatan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional, serta fasilitasi peningkatan kualitas bangunan gedung daerah. Kebijakan lain juga diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan penyesuaian harga satuan pekerjaan konstruksi. Seluruhnya ditujukan untuk memperkuat konektivitas, kualitas layanan dasar, dan mutu infrastruktur di Jawa Tengah.

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan pelayanan sumber daya air dan penataan ruang, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai mencakup meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air, keterwujudan penataan ruang, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, serta kualitas pengelolaan risiko kelembagaan.

Program prioritas yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah antara lain pengelolaan sungai, bendungan, embung, dan jaringan irigasi; pembangunan bangunan pengendali banjir, pengaman pantai, dan normalisasi sungai; serta kebijakan penataan ruang melalui evaluasi RTRW kabupaten/kota dan penguatan data geospasial. Program ini penting untuk mengurangi risiko daya rusak air, menjamin ketersediaan air baku, serta memastikan pemanfaatan ruang yang selaras dengan daya dukung lingkungan.

Telaahan terhadap kedua Renstra dinas provinsi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Peningkatan kualitas jalan provinsi dan pemeliharaannya berpengaruh langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi di Kota Semarang, yang menjadi simpul utama transportasi Jawa Tengah. Program air minum dan sanitasi yang dikembangkan di tingkat provinsi juga memperkuat upaya kota dalam meningkatkan layanan dasar masyarakat.

Di sisi lain, program pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, serta penataan ruang di tingkat provinsi memiliki dampak strategis bagi Kota Semarang yang menghadapi tantangan banjir, rob, dan penurunan muka tanah. Sinergi antara pemerintah provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang akan menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan drainase, pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan penataan ruang kota dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, Renstra kedua dinas provinsi ini bukan hanya menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi kerangka pendukung yang penting bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur kota yang tangguh, berkelanjutan, dan sesuai arah pembangunan Jawa Tengah.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Dinas Pekerjaan Umum dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Semarang adalah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kota Semarang, Bappeda berkewajiban untuk mengawal perencanaan pada RTRW agar dapat terwadahi dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, tak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum. Perencanaan tata ruang wilayah memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui:

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, meliputi :
    1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional, meliputi :
        a) Menerapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
        b) Mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
        c) Mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;

d) Mengembangkan kegiatan Pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
e) Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
f) Mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.

2. Peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan, meliputi:
   a) meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
   b) mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) jalan lingkar tengah (middle ring road), jalan lingkar luar (outer ring road), dan jalan radial;
   c) meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
   d) mengembangkan sistem transportasi massal;
   e) mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
   f) mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan meningkatkan integrasi sistem antar moda.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum, meliputi:
   a) mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
   b) mengembangkan sistem prasarana energi;
   c) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi padakawasan pertumbuhan ekonomi;
   d) mengembangkan prasarana sumber daya air;
   e) meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
   f) meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
   g) meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
   h) mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang, meliputi :
   1. Kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan lindung, meliputi :
      a) Peningkatan pengelolaan Kawasan yang berfungsi lindung, meliputi :
         1) mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
         2) meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
         3) menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.
      b) Pelestarian Kawasan cagar budaya, meliputi :
         1) meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
         2) mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
      c) Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota, meliputi :
         1) mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
         2) mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih

fungsi;
3) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
4) mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahankering yang dimiliki masyarakat;
5) mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau;dan
6) mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalampenyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

2. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan budidaya, meliputi :
   a) pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan dayadukung dan daya tampung, meliputi :
      1) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;
      2) mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
      3) membatasi pengembangan kawasan industri.
   b) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien, meliputi :
      1) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal dikawasan pusat kota; dan
      2) mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisiendengan sistem insentif dan disinsentif
   c) pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai, meliputi :
      1) mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat;
      2) mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untukmenanggulangi potensi banjir dan rob; dan
      3) melakukan penghijauan kawasan pantai

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi:
   1. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi :
      a) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan
      b) mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorongperannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.
   2. pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
      a) mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
      b) mengatur pemanfaatan Kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
      c) meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial Kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
   3. pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
      a) memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
      b) mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian;dan
      c) pengembangan kegiatan kepariwisataan.

d. Rencana Struktur Ruang, meliputi :
   1. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan, meliputi :
      a) rencana pembagian wilayah kota (BWK)
         Rencana pembagian wilayah kota (BWK) meliputi:
         1) BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan;
         2) BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur;
         3) BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara;
         4) BWK IV meliputi Kecamatan Genuk;
         5) BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan;
         6) BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang;
         7) BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik;
         8) BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati;
         9) BWK IX meliputi Kecamatan Mijen; dan
         10) BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.

         Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing BWK meliputi:
         1) perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, BWK II, BWK III;
         2) pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II;
         3) transportasi udara dan transportasi laut di BWK III;
         4) industri di BWK IV dan BWK X;
         5) pendidikan di BWK VI dan BWK VIII;
         6) perkantoran militer di BWK VII; dan
         7) kantor pelayanan publik di BWK IX.

      b) Rencana penetapan pusat pelayanan.
   2. Rencana pengembangan sistem jaringan, meliputi :
      a) rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
      b) rencana pengembangan sistem jaringan energi;
      c) rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
      d) rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
      e) rencana pengembangan pengembangan sistem infrastruktur perkotaan; dan
      f) rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan lainnya
      g) Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui pendekatan berbasis data dan perencanaan terpadu. Dinas ini berfokus pada pengembangan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan pengelolaan ruang kota untuk mendukung aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan tata ruang wilayah. Melalui analisis tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum mengidentifikasi potensi pengembangan pusat pelayanan kegiatan, kawasan strategis, serta infrastruktur pendukung untuk memastikan konektivitas antarkawasan dan optimalisasi layanan publik.
      h) Pemanfaatan teknologi menjadi prioritas dalam mendukung program kerja, seperti penggunaan sistem informasi berbasis

GIS untuk memetakan kebutuhan infrastruktur strategis dan mitigasi risiko bencana seperti rob dan banjir. Inovasi pengelolaan kawasan pesisir juga menjadi fokus, termasuk pembangunan tanggul pantai, sistem drainase terpadu, dan ruang terbuka hijau. Dinas Pekerjaan Umum turut berkontribusi dalam memperkuat aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan, jembatan, dan moda transportasi massal, termasuk pembangunan jalan lingkar dan terminal angkutan yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional.

i) Dalam bidang ekonomi dan sosial, Dinas Pekerjaan Umum berperan mendukung kawasan strategis yang memadukan pengembangan infrastruktur dengan aktivitas pariwisata, perdagangan, dan jasa berbasis budaya serta edukasi. Dengan pendekatan ini, Dinas Pekerjaan Umum berkomitmen untuk menjaga keseimbangan ekologi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas layanan serta kenyamanan hidup masyarakat Kota Semarang secara berkelanjutan.

j) Berdasarkan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, terdapat indikasi program yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Indikasi Program Berdasarkan RTRW Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	Rancangan persimpangan								
2	Peningkatan seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Kota							APBD	Dinas Bina Marga

Sumber : Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang perlu memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar arah pembangunan infrastruktur sejalan dengan prinsip berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029, isu utama yang terkait langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah terkait "Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim"

Tabel 2.10.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim	1. Penurunan Muka Tanah (*Land Subsidence*) yang Signifikan
	2. Meningkatnya Ancaman Banjir dan Rob
	3. Kerawanan Gerakan Tanah dan Longsor di Wilayah Dataran Tinggi
	4. Rendahnya Kapasitas Mitigasi Bencana Lingkungan
	5. Kerentanan Perubahan Iklim yang Tinggi di Sebagian Besar Wilayah Kecamatan

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, telaahan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Isu Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum	Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Pekerjaan Umum	Target			Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- Posisi strategis Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi. - Kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan. - Rekam jejak kerja sama nasional dan internasional di bidang infrastruktur. - Kapasitas inovasi melalui SILAPPU dan Pipa Resap Horizontal. - Dukungan sumber daya manusia perkotaan yang dinamis. - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur. - Dukungan kebijakan pembangunan daerah sebagai kota cepat maju dan cepat tumbuh.	- Kurangnya dukungan teknologi modern dan terintegrasi - Keterbatasan kapasitas SDM untuk inovasi - Keterbatasan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap - Kurangnya pengawasan dan pengelolaan utilitas - Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas sistem drainase - Keterbatasan pengelolaan dan penyediaan sumber daya air - Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum - Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air dan ruang - Belum optimalnya penyelenggaraan fungsi kelembagaan	- Penurunan muka tanah (land subsidence). - Meningkatnya ancaman banjir dan rob. - Kerawanan gerakan tanah dan longsor di wilayah dataran tinggi. - Rendahnya kapasitas mitigasi bencana lingkungan. - Kerentanan perubahan iklim di sebagian besar wilayah kecamatan.	SDGs 6: Air bersih dan sanitasi layak. SDGs 9: Infrastruktur yang tangguh, industrialisasi inklusif, dan inovasi. SDGs 11: Kota dan permukiman berkelanjutan. SDGs 13: Penanganan perubahan iklim.	Prioritas 3 Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang tangguh bencana dan adaptif iklim. Penguatan sistem drainase, rumah pompa, dan kolam retensi. Rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan perkotaan. Dukungan terhadap pengentasan kemiskinan, akses air bersih, dan sanitasi layak.	Mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dan lestari. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah. Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi (banjir, rob, longsor). Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi. Penataan ruang berkelanjutan dan konservasi sumber daya air.	Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air yang berkualitas dan tangguh bencana. Optimalisasi konektivitas melalui peningkatan kondisi jalan dan utilitas pendukung. Revitalisasi sistem drainase kota serta pembangunan rumah pompa dan kolam retensi. Pembangunan infrastruktur kota yang inklusif dan responsif gender. Penguatan inovasi, teknologi, dan kapasitas kelembagaan.

Sumber: .. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang pekerjaan umum. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase
- Meningkatnya konektivitas infrastuktur antar wilayah

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menurunnya kawasan banjir dan rob	Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga.		Persentase genangan, banjir, dan rob	%	5,85	5,67	5,49	5,31	5,13	4,95	
		Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase	Persentase genangan air	%	2,92	2,83	2,74	2,65	2,56	2,47	
			Persentase kawasan banjir	%	1,88	1,8	1,72	1,64	1,56	1,48	
			Persentase kawasan rob	%	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	
			Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun	%	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan		Meningkatnya konektivitas infrastuktur antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	94,00	94,20	94,40	94,60	94,80	95,00	
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	91,91	92,01	92,11	92,21	92,31	92,41	
			Persentase jalan dan jembatan yang terbangun	%	100	100	100	100	100	000	
		Meningkatnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum	%	77,36	77,70	78,05	78,40	78,75	79,10	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum	%	82,68	84,03	85,39	86,74	88,12	89,45	

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan mendukung pencapaian RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
Penguatan sistem data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum.	Peningkatan kualitas data spasial dan integrasi sistem informasi pembangunan daerah.	Penguatan pemanfaatan data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi infrastruktur.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan transparansi informasi infrastruktur.	Terwujudnya sistem data infrastruktur yang terpadu dan terbuka.
Optimalisasi fungsi kelembagaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur.	Peningkatan kinerja kelembagaan melalui reformasi birokrasi dan kolaborasi lintas sektor.	Penguatan peran kelembagaan dalam pengendalian banjir, rob, dan drainase kota.	Percepatan sinkronisasi kelembagaan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan.	Konsolidasi fungsi kelembagaan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pelayanan publik.
Penyusunan prioritas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur dasar di	Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung	Penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas sesuai target	Tercapainya target pembangunan infrastruktur dasar dan

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
dasar dengan pendekatan berbasis data baseline.	kawasan prioritas sesuai hasil pemetaan kebutuhan.	konektivitas wilayah dan pengendalian banjir.	RPJMD dan rencana teknis.	strategis yang mendukung ketahanan banjir, konektivitas wilayah, dan kualitas hidup masyarakat.

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
	Menurunnya kawasan banjir dan rob	Penguatan sistem drainase kota dan peningkatan pengendalian banjir dan rob.	Meningkatkan kapasitas drainase, sarana pengendali banjir dan pompa, serta efektivitas operasi dan pemeliharaan berbasis data dan dokumen teknis yang selaras rencana tata ruang.	
	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan	Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi publik.	Memutakhirkan data kebinamargaan, mengoptimalkan pendanaan, dan meningkatkan pemeliharaan jalan, jembatan, serta sarana pelengkap untuk mendukung konektivitas.	
		Penyediaan infrastruktur yang inklusif bagi kelompok rentan dan difabel	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan ruang milik jalan agar sarana pelengkap dan utilitas tetap berfungsi optimal.	
			Mengembangkan basis data terintegrasi, memanfaatkan aplikasi digital perencanaan dan keuangan, serta meningkatkan pengelolaan SDM, pengadaan, dan pemeliharaan aset.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Sasaran RPJMD yang relevan: Menurunnya kawasan banjir dan rob	Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga				INDIKATOR TUJUAN: Persentase genangan, banjir, dan rob		
		Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase			INDIKATOR SASARAN: Persentase genangan air		
					INDIKATOR SASARAN: Persentase kawasan banjir		
					INDIKATOR SASARAN: Persentase kawasan rob		
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota		INDIKATOR PROGRAM: Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
					INDIKATOR PROGRAM: Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob		Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
				SASARAN KEGIATAN : Berkurangnya luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah kewenangan kabupaten/kota	INDIKATOR KEGIATAN: luas kawasan rawan banjir terlindungi	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 03 02 2.01 0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Meningkatnya Tanggul Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	1 03 02 2.01 0103 Peningkatan Tanggul Sungai	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Tanggul Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi	1 03 02 2.01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 03 02 2.01 0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Timur	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pompa Timur

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Barat	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pompa Barat
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah I	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pompa Tengah I
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah II	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pompa Tengah II

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN KEGIATAN : Jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi untuk mendukung layanan multikomoditas.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
			SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis sumber daya air		INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan		Bidang Rekayasa Teknis
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen perancangan teknis sumber daya air.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen perancangan teknis sumber daya air yang disusun	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Perancangan Teknis

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Perancangan Teknis
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur Sumber Daya Air	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur Sumber Daya Air yang tersusun	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Pengembangan Teknologi Infrastruktur
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya pemanfaatan ruang sungai		INDIKATOR PROGRAM: Persentase sungai yang termanfaatkan		Bidang Pendayagunaan infrastruktur

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN KEGIATAN : Pemanfaatan sungai untuk fungsi lingkungan, konservasi, dan kegiatan masyarakat.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase sungai yang direstorasi	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah pendayagunaan Sumber Daya Air	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kondisi sistem drainase		INDIKATOR PROGRAM: Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Bidang SDA dan Drainase
				SASARAN KEGIATAN : Tersedianya infrastruktur pengaman yang melindungi kawasan permukiman dari risiko abrasi, erosi, dan akresi.	INDIKATOR KEGIATAN: Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Drainase

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah saluran drainase yang terpelihara	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Drainase
				SASARAN KEGAITAN: Tersedianya sarana pendukung pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase sarana pendukung, peralatan dan perbengkelan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah sarana pendukung dalam kondisi baik	1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	
				SASARAN KEGIATAN: Tersedianya material drainase	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase material drainase yang tersedia	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbekalan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah saluran drainase yang terpelihara	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase		INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Bidang Rektek
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis sistem drainase perkotaan sebagai acuan pembangunan dan pengelolaan drainase.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Perancangan Teknis

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
	Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga				INDIKATOR TUJUAN: Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun		
		Meningkatnya konektivitas infrastuktur antar wilayah			INDIKATOR SASARAN: Persentase jalan dalam kondisi mantap		
					INDIKATOR SASARAN: Persentase jembatan dalam kondisi baik		
					INDIKATOR SASARAN: Persentase jalan dan jembatan yang terbangun		
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kondisi jalan		INDIKATOR PROGRAM: Persentase jalan dalam kondisi baik	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Bidang Bina Marga
				SASARAN KEGIATAN : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan direhabilitasi	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pembangunan Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pembangunan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang jembatan yang dibangun	1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan	
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase jalan dan jembatan yang ditingkatkan kualitasnya dan dipelihara	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				SASARAN KEGIATAN: Tersedianya Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	
				SASARAN KEGIATAN: Tersedianya material Bina marga	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase material Bina Marga yang tersedia	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Perbekalan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pengujian dan pemantauan panjang jalan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang diuji dan dipantau	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pengujian dan Laboraturium (Nginduk di Bidang BM)
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1.03.10.2.01.0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah I	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pemeilharaan Jalan dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				wilayah I			Drainase Wilayah I
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kasubag TU - UPTD
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah II	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah II	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kasubag TU - UPTD
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah III	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah III	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kasubag TU - UPTD
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah IV	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah IV	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kasubag TU - UPTD
			SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis kebinamargaan		INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Bidang Rekayasa Teknis
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis survei dan pengukuran	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis survei dan pengukuran yang tersusun	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Survei dan Pengukuran
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terkelolanya Leger Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan yang disusun	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoor Perancangan Teknis
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur jalan dan jembatan yang tersusun	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoor Pengembangan Teknologi Infrastruktur
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya ruang milik jalan yang dipelihara		INDIKATOR PROGRAM: Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Bidang Pendayagunaan Infrastruktur
				SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan ruang milik jalan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase ruang milik jalan yang dipelihara	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pendayagunaan Ruang Milik Jalan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Pendayagunaan Ruang Milik Jalan yang Dipelihara	1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	
		Meningkatnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum			INDIKATOR SASARAN: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum		
					INDIKATOR SASARAN: Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum		INDIKATOR PROGRAM: Persentase perencanaan serta, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang berkualitas	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT
			SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum		INDIKATOR PROGRAM: Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum		
				SASARAN KEGIATAN : Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.03.01.2.01.08 Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				SASARAN KEGIATAN : Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi	1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					pelaksanaan tugas ASN		
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran	1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan.	1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Nilai layanan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.03.01.2.05.11 BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pekerjaan Umum	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket peralatan rumah tangga	1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Logistik Kantor		Kantor	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Mebel	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket mebel yang disediakan	1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan Masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum yang selesai ditindaklanjuti	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah mebel yang dipelihara	1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah gedung kantor dan	1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipeliharaan/ rehabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terwujudnya pelayanan internal yg berkualitas dalam mendukung kinerja dinas pekerjaan umum		INDIKATOR PROGRAM : Persentase terlaksananya kegiatan penyiapan lahan	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bidang Pendayagunaan Infrastruktur
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase ketersediaan lahan untuk peningkatan infrastruktur	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subkoordinator Penyiapan Lahan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	1.03.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan dan Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	• Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin • Normalisasi Sungai Plumbon • Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang dan Sungai Asin • Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu • Normalisasi Sungai Babon • Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen • Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo • Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor • Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) • Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor	Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	• Peningkatan pemeliharaan saluran drainase • Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin • Normalisasi Sungai Plumbon • Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang dan Sungai Asin • Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu • Normalisasi Sungai Babon • Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen • Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo • Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor • Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) • Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor	Meningkatnya kondisi sistem drainase	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	• Rekondisi Kartini Drain, termasuk Stasiun Pompa	Meningkatnya stasiun pompa dalam kondisi baik	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	• Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan • Rintisan pembangunan Jalan Srondol – Sekaran • Pembangunan Semarang Middle	Meningkatnya kondisi jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Ring Road • Pengembangan Semarang Outer Ring Road			

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				387.517.662.431		429.052.333.082		447.130.155.055		449.237.664.645		458.283.493.826	
	INDIKATOR TUJUAN: Persentase genangan, banjir, dan rob		5,67		5,49		5,31		5,13		4,95		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase genangan air	NA	2,83		2,74		2,65		2,56		2,47		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase kawasan banjir	2,23	1,8		1,72		1,64		1,56		1,48		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase kawasan rob	1,06	1,04		1,03		1,02		1,01		1,00		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				51.995.455.166		57.496.346.844		59.890.590.951		60.330.379.572		61.367.749.851	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	INDIKATOR PROGRAM: Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir		98,20%	48.795.455.166	98,28%	52.796.346.844	98,36%	55.690.590.951	98,44%	57.130.379.572	98,52%	48.167.749.851	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
	INDIKATOR PROGRAM: Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob		98,96%		98,97%		98,98%		98,99%		99,00%		Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				21.995.455.166		24.500.000.000		28.500.000.000		32.130.379.572		23.167.749.851	
SASARAN KEGIATAN : Berkurangnya luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah kewenangan kabupaten/kota	INDIKATOR KEGIATAN: luas kawasan rawan banjir terlindungi	87,37 %	100%	21.995.455.166	100%	24.500.000.000	100%	28.500.000.000	100%	32.130.379.572	100%	23.167.749.851	Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1 03 02 2.01 0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				500.000.000		500.000.000		-		-		-	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun		2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	94,20 %	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir				15.000.000.000		17.500.000.000		22.000.000.000		25.000.000.000		9.667.749.851	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	90,62 %	1 Unit	15.000.000.000	1 Unit	17.500.000.000	1 Unit	22.000.000.000	1 Unit	25.000.000.000	1 Unit	9.667.749.851	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	99,33 %	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	94,63 %	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1 03 02 2.01 0103 Peningkatan Tanggul Sungai				-		-		-		-	0.25	7.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Meningkatnya Tanggul Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan		0 Km	-	0 Km	-	0 Km	-	0 Km	-	0.25	7.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1 03 02 2.01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.630.379.572		1.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Tanggul Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi		1 Km	1.000.000.000	1 Km	1.000.000.000	1 Km	1.000.000.000	1,5 Km	1.630.379.572	1 Km	1.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1 03 02 2.01 0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				995.455.166		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		2 Km	995.455.166	2 Km	1.000.000.000	2 Km	1.000.000.000	2 Km	1.000.000.000	2 Km	1.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.500.000.000		4.000.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Timur	82,06	100%	4.500.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.250.000.000	100%	4.250.000.000	100%	4.250.000.000	UPTD Pompa Timur
1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				4.500.000.000		4.000.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		19	4.500.000.000	19	4.000.000.000	19	4.250.000.000	19	4.250.000.000	19	4.250.000.000	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.500.000.000		3.796.346.844		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Barat		100%	4.500.000.000	100%	3.796.346.844	100%	4.250.000.000	100%	4.250.000.000	100%	4.250.000.000	UPTD Pompa Barat
1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				4.500.000.000		3.796.346.844		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		4	4.500.000.000	4	3.796.346.844	4	4.250.000.000	4	4.250.000.000	4	4.250.000.000	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah I		100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	UPTD Pompa Tengah I
1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		5	5.500.000.000	5	5.500.000.000	5	5.500.000.000	5	5.500.000.000	5	5.500.000.000	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.500.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah II		100%	8.500.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	UPTD Pompa Tengah II
1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				8.500.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		24	8.500.000.000	24	8.000.000.000	24	8.000.000.000	24	8.000.000.000	24	8.000.000.000	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.800.000.000		7.000.000.000		5.190.590.951		3.000.000.000		3.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi untuk mendukung layanan multikomoditas.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi	92,09	100%	3.800.000.000	100%	7.000.000.000	100%	5.190.590.951	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	Subkoor Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
1.03.02.2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				-		2.500.000.000		1.500.000.000		-		-	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0 KM	-	2 KM	2.500.000.000	2 KM	1.500.000.000	0 KM	-	0 KM	-	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.800.000.000		4.500.000.000		3.690.590.951		3.000.000.000		3.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	92,06 %	11 KM	3.800.000.000	11 KM	4.500.000.000	11 KM	3.690.590.951	11 KM	3.000.000.000	11 KM	3.000.000.000	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis sumber daya air	INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan		100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	Bidang Rekayasa Teknis
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen perancangan teknis sumber daya air.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen perancangan teknis sumber daya air yang disusun		100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	Subkoor Perancangan Teknis
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	96,65	8 Dokumen	800.000.000	8 Dokumen	800.000.000	8 Dokumen	800.000.000	8 Dokumen	800.000.000	8 Dokumen	800.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun		100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	Subkoor Perancangan Teknis
1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun		2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur Sumber Daya Air	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur Sumber Daya Air yang tersusun		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Subkoor Pengembangan Teknologi Infrastruktur

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya pemanfaatan ruang sungai	INDIKATOR PROGRAM: Persentase sungai yang termanfaatkan		100%	2.000.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	12.000.000.000	Bidang Pendayagunaan infrastruktur

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		3.500.000.000		3.000.000.000		2.000.000.000		12.000.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Pemanfaatan sungai untuk fungsi lingkungan, konservasi, dan kegiatan masyarakat.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase sungai yang direstorasi		100%	2.000.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	12.000.000.000	Subkoordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir				-		-		-		-		10.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	88,08	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	10.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai				2.000.000.000		3.500.000.000		3.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah pendayagunaan Sumber Daya Air	92,58	1 KM	2.000.000.000	1 KM	3.500.000.000	1 KM	3.000.000.000	1 KM	2.000.000.000	1 KM	2.000.000.000	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				122.956.754.320		135.965.040.994		141.626.852.848		142.666.847.233		145.119.978.611	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kondisi sistem drainase	INDIKATOR PROGRAM: Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	60,57	61,77	120.056.754.320	62,37	133.765.040.994	62,97	138.226.852.848	63,57	140.666.847.233	64,17	143.119.978.611	Bidang SDA dan Drainase

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				68.000.000.000		80.500.000.000		85.000.000.000		89.000.000.000		90.000.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersedianya infrastruktur pengaman yang melindungi kawasan permukiman dari risiko abrasi, erosi, dan akresi.	INDIKATOR KEGIATAN: Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/ Kota		61,77%	68.000.000.000	62,37%	80.500.000.000	62,97%	85.000.000.000	63,57%	89.000.000.000	64,17%	90.000.000.000	Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase
1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan				38.000.000.000		55.500.000.000		40.000.000.000		44.000.000.000		50.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang	76,09 %	4 Sistem	38.000.000.000	4 Sistem	55.500.000.000	4 Sistem	40.000.000.000	4 Sistem	44.000.000.000	4 Sistem	50.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Drainase

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Ditingkatkan												
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				30.000.000.000		25.000.000.000		45.000.000.000		45.000.000.000		40.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah saluran drainase yang terpelihara		4 Sistem	30.000.000.000	4 Sistem	25.000.000.000	4 Sistem	45.000.000.000	4 Sistem	45.000.000.000	4 Sistem	40.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Drainase
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000.000		20.000.000.000		14.500.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGAITAN: Tersedianya sarana pendukung pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase sarana pendukung, peralatan dan perbengkelan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		100%	15.000.000.000	100%	20.000.000.000	100%	14.500.000.000	100%	11.000.000.000	100%	11.000.000.000	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan													
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah sarana pendukung dalam kondisi baik		60 Unit	15.000.000.000	60 Unit	20.000.000.000	60 Unit	14.500.000.000	60 Unit	11.000.000.000	60 Unit	11.000.000.000	
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				37.056.754.320		33.265.040.994		38.726.852.848		40.666.847.233		42.119.978.611	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN: Tersedianya material drainase	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase material drainase yang tersedia		100%	37.056.754.320	100%	33.265.040.994	100%	38.726.852.848	100%	40.666.847.233	100%	42.119.978.611	UPTD Perbekalan
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan													
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah saluran drainase yang terpelihara		4 Sistem	37.056.754.320	4 Sistem	33.265.040.994	4 Sistem	38.726.852.848	4 Sistem	40.666.847.233	4 Sistem	42.119.978.611	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				2.900.000.000		2.200.000.000		3.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase	INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan		100%	2.900.000.000	100%	2.200.000.000	100%	3.400.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	Bidang Rektek
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.900.000.000	100%	2.200.000.000	100%	3.400.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis sistem drainase perkotaan sebagai acuan pembangunan dan pengelolaan drainase.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang disusun		100%	2.900.000.000	100%	2.200.000.000	100%	3.400.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	Subkoordinator Perancangan Teknis
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				2.900.000.000	11 Dokumen	2.200.000.000	15 Dokumen	3.400.000.000	10 Dokumen	2.000.000.000	10 Dokumen	2.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	94,70 %	14 Dokumen	2.900.000.000	11 Dokumen	2.200.000.000	15 Dokumen	3.400.000.000	10 Dokumen	2.000.000.000	10 Dokumen	2.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
	INDIKATOR TUJUAN: Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase jalan dalam kondisi mantap	93,27	94,20		94,40		94,60		94,80		95,00		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase jembatan dalam kondisi baik	91,90	92,01		92,11		92,21		92,31		92,41		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase jalan dan jembatan yang terbangun	100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				141.363.704.631		156.319.366.117		162.828.766.134		164.024.450.421		166.844.822.034	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kondisi jalan	INDIKATOR PROGRAM: Persentase jalan dalam kondisi baik	50,34	50,94	141.363.704.631	51,24	156.319.366.117	51,54	162.828.766.134	51,84	150.924.450.421	54,24	166.844.822.034	Bidang Bina Marga
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				29.500.000.000		40.800.000.000		60.500.000.000		61.000.000.000		54.000.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan direhabilitasi	93,08 %	100%	29.500.000.000	100%	40.800.000.000	100%	60.500.000.000	100%	61.000.000.000	100%	54.000.000.000	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan				-		-		34.000.000.000		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pembangunan Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	87,87	0 KM	-	0 KM	-	1,5 KM	34.000.000.000	0 KM	-	0 KM	-	
1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan				17.000.000.000				-		30.000.000.000		37.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pembangunan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang jembatan yang dibangun	70,14	15 M	17.000.000.000	0 M		0 M	-	24 M	30.000.000.000	28 M	37.000.000.000	
1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan				12.500.000.000		20.800.000.000		26.500.000.000		11.000.000.000		4.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Direhabilitasi	83,89	3 KM	12.500.000.000	5 KM	20.800.000.000	6,5 KM	26.500.000.000	2,7 KM	11.000.000.000	0,9 KM	4.000.000.000	
1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan				-		20.000.000.000		-		20.000.000.000		13.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	71,26	0 M	-	25 M	20.000.000.000	0 M	-	25 M	20.000.000.000	12 M	13.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				52.500.000.000		52.000.000.000		46.500.000.000		46.500.000.000		56.500.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase jalan dan jembatan yang ditingkatkan kualitasnya dan dipelihara			52.500.000.000	-	52.000.000.000	-	46.500.000.000	-	46.500.000.000	0	56.500.000.000	Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan				51.000.000.000		50.500.000.000		45.000.000.000		45.000.000.000		55.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	99,2	16 KM	51.000.000.000	16 KM	50.500.000.000	14 KM	45.000.000.000	14 KM	45.000.000.000	17,5 KM	55.000.000.000	
1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	86,21	20 Jembatan	1.500.000.000	20 Jembatan	1.500.000.000	20 Jembatan	1.500.000.000	20 Jembatan	1.500.000.000	20 Jembatan	1.500.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				17.000.000.000		22.000.000.000		17.000.000.000		17.000.000.000		17.000.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Tersedianya Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan			17.000.000.000		22.000.000.000		17.000.000.000		17.000.000.000		17.000.000.000	Subkoordinator Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				17.000.000.000		22.000.000.000		17.000.000.000		17.000.000.000		17.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	360,72	360 KM	17.000.000.000	476 KM	22.000.000.000	360 KM	17.000.000.000	360 KM	17.000.000.000	360 KM	17.000.000.000	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				10.163.704.631		10.119.366.117		9.628.766.134		10.824.450.421		10.644.822.034	
SASARAN KEGIATAN: Tersedianya material Bina marga	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase material Bina Marga yang tersedia		100%	10.163.704.631	100%	10.119.366.117	100%	9.628.766.134	100%	10.824.450.421	100%	10.644.822.034	UPTD Perbekalan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan				10.163.704.631		10.119.366.117		9.628.766.134		10.824.450.421		10.644.822.034	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		16 KM	10.163.704.631	16 KM	10.119.366.117	14 KM	9.628.766.134	14 KM	10.824.450.421	17,5 KM	10.644.822.034	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				2.100.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pengujian dan pemantauan panjang jalan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang diuji dan dipantau	NA	100%	2.100.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	UPTD Pengujian dan Laboraturium (Nginduk di Bidang BM)
1.03.10.2.01.0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				2.100.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	73,9	21 KM	2.100.000.000	16 KM	1.600.000.000	16 KM	1.600.000.000	16 KM	1.600.000.000	16 KM	1.600.000.000	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah I	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah I			3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	Kasubag TU - UPTD
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah II	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah II			3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		48 KM	3.500.000.000	48 KM	3.500.000.000	48 KM	3.500.000.000	48 KM	3.500.000.000	48 KM	3.500.000.000	Kasubag TU - UPTD
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah III	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah III			4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		78 KM	4.000.000.000	78 KM	4.000.000.000	78 KM	4.000.000.000	78 KM	4.000.000.000	78 KM	4.000.000.000	Kasubag TU - UPTD

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah IV	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah IV			3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		112 KM	3.250.000.000	112 KM	3.250.000.000	112 KM	3.250.000.000	112 KM	3.250.000.000	112 KM	3.250.000.000	Kasubag TU - UPTD
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis kebinamargaan	INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan			4.100.000.000		3.800.000.000		3.600.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000	Bidang Rekayasa Teknis

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis survei dan pengukuran	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis survei dan pengukuran yang tersusun		100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	Subkoordinator Survei dan Pengukuran
1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terkelolanya Leger Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	94,99	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	96,91	839 KM	800.000.000	839 KM	800.000.000	839 KM	800.000.000	839 KM	800.000.000	839 KM	800.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				2.700.000.000		2.400.000.000		2.200.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan yang disusun		100%	2.700.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.200.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	Subkoor Perancangan Teknis
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.700.000.000		2.400.000.000		2.200.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	97,88	12 Dokumen	2.700.000.000	12 Dokumen	2.400.000.000	10 Dokumen	2.200.000.000	10 Dokumen	1.700.000.000	10 Dokumen	1.700.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun												
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur jalan dan jembatan yang tersusun		100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Subkoor Pengembangan Teknologi Infrastruktur
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	97,88	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	300.000.000	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya ruang milik jalan yang dipelihara	INDIKATOR PROGRAM: Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara			12.000.000.000		12.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	Bidang Pendayagunaan Infrastruktur
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				12.000.000.000		12.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan ruang milik jalan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase ruang milik jalan yang dipelihara	56,59 %	59,69%	12.000.000.000	61,24%	12.000.000.000	62,79%	10.000.000.000	64,34%	10.000.000.000	65,89%	10.000.000.000	Subkoordinator Pendayagunaan Ruang Milik Jalan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan				12.000.000.000		12.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Pendayagunaan Ruang Milik Jalan yang Dipelihara	96,73 %	15,3 KM	12.000.000.000	15,3 KM	12.000.000.000	15,3 KM	10.000.000.000	15,3 KM	10.000.000.000	15,3 KM	10.000.000.000	
	INDIKATOR SASARAN: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum	77,35	77,70		78,05		78,40		78,75		79,10		
	INDIKATOR SASARAN: Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum	81,33	84,03		85,39		86,74		88,12		89,45		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				71.201.748.314		79.271.579.127		82.783.945.122		82.215.987.419		84.950.943.330	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
DAERAH KABUPATEN/KOTA													
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR PROGRAM: Persentase perencanaan serta, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang berkualitas		100%	71.201.748.314	100%	73.891.660.488	100%	76.972.353.410	100%	78.577.077.077	100%	81.312.032.988	SEKRETARIAT
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR PROGRAM: Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum		100%	-	100%		100%		100%		100%		
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	81,21 %	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	98,04 %	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	41,75 %	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	60,23 %	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	70,32 %	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	88,95 %	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
1.03.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
SASARAN KEGIATAN : Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan												Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	66,33 %	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47.284.092.122	100%	49.646.660.488	100%	52.127.353.410	100%	54.732.077.077	100%	57.467.032.988	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	96,79 %	100%	47.284.092.122	100%	49.646.660.488	100%	52.127.353.410	100%	54.732.077.077	100%	57.467.032.988	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				47.259.092.122		49.621.660.488		52.102.353.410		54.707.077.077		57.442.032.988	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	97,47 %	400 Orang/ bulan	47.259.092.122	400 Orang/ bulan	49.621.660.488	400 Orang/bulan	52.102.353.410	400 Orang/bulan	54.707.077.077	400 Orang/bulan	57.442.032.988	
1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	73,65 %	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	98,67 %	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	98,46 %	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran	97,43 %	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan.	98,77 %	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	99,48 %	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	97,72 %	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Nilai layanan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	51,04 %	100%	115.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	58,72 %	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	43,35 %	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
1.03.01.2.05.11 BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000									

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 orang	100.000.000									
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pekerjaan Umum	86,34 %	100%	2.507.656.192	100%	2.635.000.000	100%	2.635.000.000	100%	2.635.000.000	100%	2.635.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	98,05 %	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				602.656.192		730.000.000		730.000.000		730.000.000		730.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	91,89 %	4 Paket	602.656.192	4 Paket	730.000.000	4 Paket	730.000.000	4 Paket	730.000.000	4 Paket	730.000.000	
1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket peralatan rumah tangga	86,42 %	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	74,77 %	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	
1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99,25 %	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	90,04 %	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	59,53 %	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	
1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				300.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	89,58 %	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	
1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000							
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000							
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000		400.000.000		1.000.000.000		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	87,06 %	100%	100.000.000	100%	400.000.000	100%	1.000.000.000	100%	-	100%	-	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.000							
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1	300.000.000							
1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				100.000.000									
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Mebel	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket mebel yang disediakan	73,33 %	20 unit	100.000.000	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		
1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000							

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4	100.000.000							
1.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								1.000.000.000					
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	92,80 %	0 Unit		0 Unit		1 Unit	1.000.000.000	0 Unit		0 Unit		
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan Masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum yang selesai ditindaklanjuti	89,18 %	100%	16.020.000.000	100%	17.020.000.000	100%	17.020.000.000	100%	17.020.000.000	100%	17.020.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	96,13 %	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90,75 %	1 Laporan	7.000.000.000	1 Laporan	7.000.000.000	1 Laporan	7.000.000.000	1 Laporan	7.000.000.000	1 Laporan	7.000.000.000	
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	87,34 %	1 Laporan	9.000.000.000	1 Laporan	10.000.000.000	1 Laporan	10.000.000.000	1 Laporan	10.000.000.000	1 Laporan	10.000.000.000	
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.075.000.000		4.075.000.000		4.075.000.000		4.075.000.000		4.075.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan	61,55 %	100%	4.075.000.000	100%	4.075.000.000	100%	4.075.000.000	100%	4.075.000.000	100%	4.075.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	66,03 %	75 Unit	3.000.000.000	75 Unit	3.000.000.000	75 Unit	3.000.000.000	75 Unit	3.000.000.000	75 Unit	3.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah mebel yang dipelihara	99,57 %	200 Unit	75.000.000	200 Unit	75.000.000	200 Unit	75.000.000	200 Unit	75.000.000	200 Unit	75.000.000	
1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	93,39 %	350 Unit	250.000.000	350 Unit	250.000.000	350 Unit	250.000.000	350 Unit	250.000.000	350 Unit	250.000.000	
1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharaan/ rehabilitasi	95,62 %	2 Unit	750.000.000	2 Unit	750.000.000	2 Unit	750.000.000	2 Unit	750.000.000	2 Unit	750.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
Terwujudnya pelayanan internal yg berkualitas dalam mendukung kinerja dinas pekerjaan umum	INDIKATOR PROGRAM : Persentase terlaksananya kegiatan penyiapan lahan		100%	1.000.000.000	100%	5.811.591.712	100%	4.852.039.769	100%	3.638.910.342	100%	3.638.910.342	Bidang Pendayagunaan Infrastruktur
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.000.000.000		5.811.591.712		4.852.039.769		3.638.910.342		3.638.910.342	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase ketersediaan lahan untuk peningkatan infrastruktur		100%	1.000.000.000	100%	5.811.591.712	100%	4.852.039.769	100%	3.638.910.342	100%	3.638.910.342	Subkoor Penyiapan Lahan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				1.000.000.000		5.811.591.712		4.852.039.769		3.638.910.342		3.638.910.342	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan / rehabilitasi	60,27 %	0,01	1.000.000.000	0,058	5.811.591.712	0,048	4.852.039.769	0,036	3.638.910.342	0,036	3.638.910.342	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase genangan, banjir, dan rob	%	5,85	5,67	5,49	5,31	5,13	4,95	
1	Persentase genangan air	%	2,92	2,83	2,74	2,65	2,56	2,47	
2	Persentase kawasan banjir	%	1,88	1,8	1,72	1,64	1,56	1,48	
3	Persentase kawasan rob	%	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	
	Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	94,00	94,20	94,40	94,60	94,80	95,00	
5	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	91,91	92,01	92,11	92,21	92,31	92,41	
6	Persentase jalan dan jembatan yang terbangun	%	100	100	100	100	100	000	

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5
2	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	94,5	95,21	95,93	96,64	97,35	98,06
3	Persentase luas sawah beririgasi	%	71,04	76,65	82,25	87,86	93,47	99,08
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	54,62	54,84	55,06	55,27	55,49	55,71

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Permasalahan genangan, banjir dan rob serta infrastruktur binamarga sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan infrastrukur secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

5. DINAS PENATAAN RUANG

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang maka Dinas Penataan Ruang Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Penataan Ruang dan bidang Pertanahan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas

Penataan Ruang Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bidang Pertanahan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah:

1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
2) Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3) Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4) Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Dinas Penataan Ruang Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal

kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mempunyai fungsi:

1) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
2) Perumusan kebijakan Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan UPTD;
3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan UPTD;
4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam tanggungjawabnya;
5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
6) Penyelenggaraan kerja sama Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan UPTD;
7) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Penataan Ruang;
8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan UPTD;
9) Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan UPTD;
11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

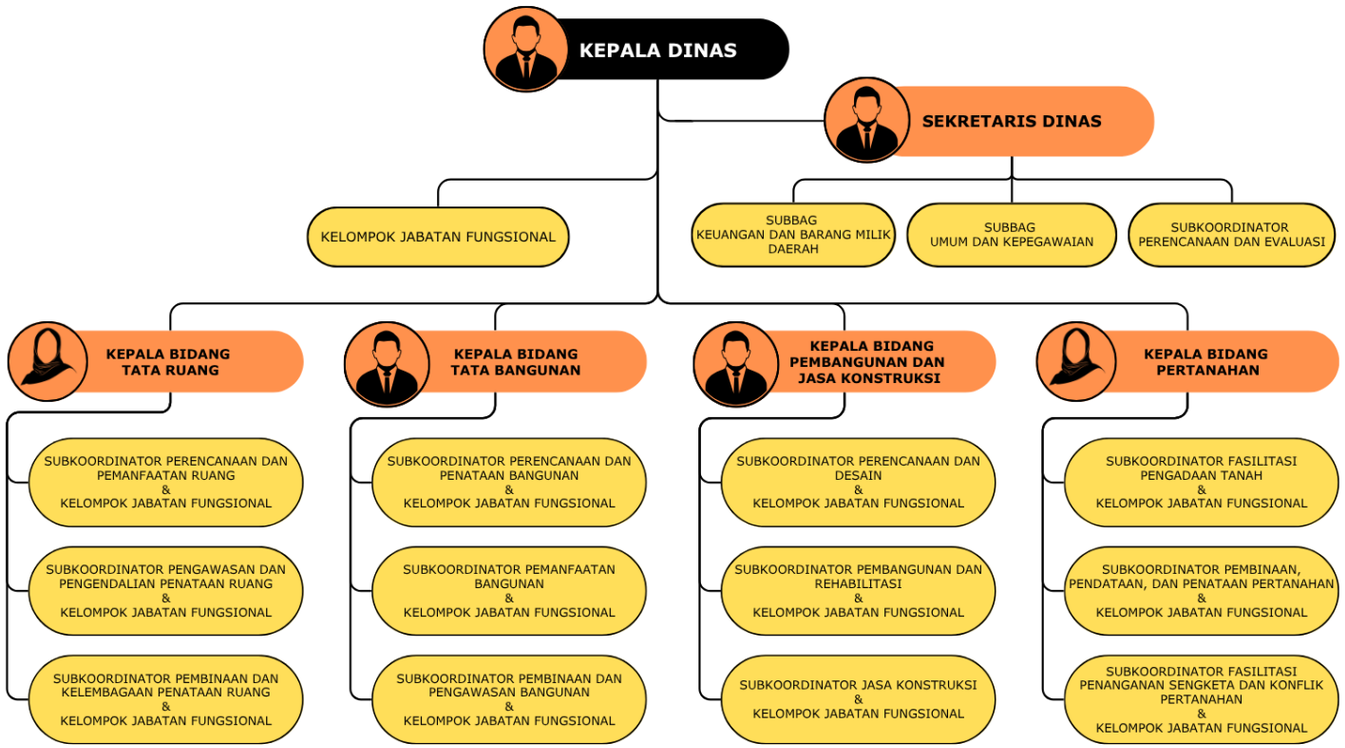

B. Uraian Tugas Dan Jabatan Struktural Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang.

2) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan UPTD. Serta diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
   Sekretariat, terdiri atas :
   a) Subbagian Keuangan dan Aset;
   b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   c) Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi dibentuk Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi, yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3) Bidang Tata Ruang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang, dan Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang.
   Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
   a) Subkoordinator Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
   b) Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang
   c) Subkoordinator Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang

   Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang

4) Bidang Tata Bangunan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Perencanaan dan Penataan Bangunan, Pemanfaatan Bangunan dan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan.

Bidang Tata Bangunan, terdiri atas :

a) Subkoordinator Perencanaan dan Penataan Bangunan
b) Subkoordinator Pemanfaatan Bangunan
c) Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Bangunan

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan

5) Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Perencanaan dan Desain, Pembangunan dan Rehabilitasi dan Jasa Konstruksi.
   Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, terdiri atas :
   a) Subkoordinator Perencanaan dan Desain
   b) Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi
   c) Subkoordinator Jasa Konstruksi

   Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi

6) Bidang Pertanahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pembinaan, Pendataan, dan Penataan Pertanahan, dan Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
   Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, terdiri atas :
   a) Subkoordinator Fasilitasi Pengadaan Tanah
   b) Subkoordinator Pembinaan, Pendataan dan Penataan Pertanahan
   c) Subkoordinator Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

   Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

7) Jabatan Fungsional
   Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para

pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

A. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		PPPK		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	17	2	12	4	5	6	46
3	D3	3	6	5	1	-	-	15
4	S1	22	17	32	35	1	3	110
5	S2	8	3	-	-	-	-	11
6	S3	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH							183

Dari jumlah pegawai sebanyak 183 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan II	8	9	17
2	Golongan III	39	19	58
3	Golongan IV	2	2	4
4	Golongan V	12	3	15
5	Golongan VII	6	1	7
6	Golongan IX	31	36	67
7	Alih Daya	6	9	15
	JUMLAH	104	79	183

B. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Aset Tanah Dinas Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Pasar	3198	2017 & 2018	Tambakmulyo, Semarang Utara	-	-	-	Pasar & RTH Kampung Bahari Tambak Lorok	Pembelian	10.743.517.350	APBD Tahun 2017 dan 2018

Tabel 2. 4 Gedung dan Bangunan Dinas Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Gudang Tertutup Permanen	B	418	Jl. Taman Bringin	418	Tanah Milik Pemda	Pembelian	977.713.010

Tabel 2. 5 Peralatan dan Mesin Kantor
Dinas Penataan Ruang 2025

No	NAMA/ JENIS BARANG	KONDISI SEKARANG		KETERANGAN
		JUMLAH	KEADAAN	
A.	**Peralatan Angkutan**			
1	Mobil	14	Baik	1 Rusak
2	Sepeda Motor Roda 2	40	Baik	
3	Sepeda Motor Roda 3	0	-	
B.	**Peralatan /PerlengkapanTeknis**			
1	Laptop	23	Baik	
2	Printer A4	61	Baik	
3	Komputer PC	17	Baik	
4	Komputer All In One	110	Baik	
5	UPS	14	Baik	
6	Alat Ukur (Theodolit)	3	Baik	
7	Alat Ukur (Leica Disto)	14	Baik	
8	Mesin ketik elektronik	2	Baik	
9	Drone	6	Baik	
10	GPS	3	Baik	
11	Printer A3	37	Baik	
12	Printer laser	3	Baik	
13	Scanner	5	Baik	
14	Komputer server	5	Baik	
15	Mesin Fotocopi	6	Baik	
16	Server	6	Baik	
19	Cisco Switch	1	Baik	
20	Cisco Switch Managed	1	Baik	
21	Komputer Note Book	1	Baik	
22	Mesin Gergaji Potong / Belah Permanen	3	Baik	
23	Alat Ukur (Thermohygrometer)	1	Baik	
24	Printer A0 - Plotter	1	Baik	
25	Alat Ukur (Thermal Imaging Camera)	1	Baik	
26	Anemometer	1	Baik	
27	Tablet Android	26	Baik	
28	Mini PC	4	Baik	
C.	**Peralatan Kantor & Rumah Tangga**			
1	Rak besi 4 susun	47	Baik	
2	Meja rapat	6	Baik	
3	Kursi Rapat	41	Baik	
4	Aquarium	2	Baik	
5	AC Split	28	Baik	
6	AC Standing Floar	4	Baik	
7	Meja kursi tamu eselon II	2	Baik	
8	Filling kabinet	7	Baik	
9	Kursi kerja Eselon III	6	Baik	
10	Kursi kerja Eselon II	1	Baik	
11	Kursi kerja Eselon IV	14	Baik	
12	Kursi staf	164	Baik	
13	Rak besi/metal	47	Baik	
14	Wireless	5	Baik	
15	Lemari Es	6	Baik	
16	Pemadam kebakaran	3	Baik	
17	Wall Exhaust Fan 12"	5	Baik	
18	Mesin Antrian	1	Baik	
19	Kursi Bar	16	Baik	
20	Meja Tamu Bundar	4	Baik	
21	Kreta Troli	2	Baik	
D.	**Peralatan Studio & Komunikasi**			
1	Layar Proyektor	3	Baik	
2	TV LED 32 INC	1	Baik	
3	TV LED 48 INC	1	Baik	
4	Camera	15	Baik	

No	NAMA/ JENIS BARANG	KONDISI SEKARANG		KETERANGAN
		JUMLAH	KEADAAN	
5	Alat audio	5	Baik	
6	LCD	10	Baik	
7	Confrence System Control	8	Baik	
8	Dispenser	6	Baik	
9	Mesin Penghancur Kertas	3	Baik	
10	CCTV	2	Baik	
11	Digital Door Lock	10	Baik	
12	Microphone Condeser Mic.	1	Baik	
13	Hammer Test	4	Baik	
14	Lux Meter	2	Baik	
15	Dry Box Camera	2	Baik	
16	Tripod/Monopod	3	Baik	
17	Tangga Teleskopik Alumunium 6 M	2	Baik	
18	Access Point	6	Baik	
19	Routerboard	9	Baik	
20	Logitech Conference Camera	2	Baik	
21	Alat Pemurni Udara	10	Baik	
22	Monitor LED 15 inch	3	Baik	
23	Kamera Mirrorless Kit	3	Baik	
24	Telepon	6	Baik	
25	Handy Talky (HT)	5	Baik	
26	Tangga BI	1	Baik	
27	Smart TV 43”	2	Baik	
28	Speaker Portable + Mic	1	Baik	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kinerja Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penataan Ruang mencerminkan sejauh mana perencanaan jangka menengah yang telah disusun dapat diterapkan dengan efektif untuk mencapai tujuan penataan ruang yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap kinerja Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis berjalan sesuai dengan visi, misi, dan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap kinerja Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

A. Capaian Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang
Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tujuan:																		
1	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjut an	%	-	-	64,69	59,47	60,49	62,76	64,77	77,70	59,47	60,49	65,63	70,6	120,11	100,00	100,00	104,57	109,00
	Sasaran																		
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	-	-	72,73	97,7	97	97,5	97,6	86,36	97,7	97	98,67	98,19	118,74	100,00	100,00	101,20	100,60
2	Persentase bangunan berijin	%	-	-	54,9	26,3	27,2	28,5	29,4	54,94	26,3	27,2	36,14	42,4	100,07	100,00	100,00	126,81	144,22
3	Persentase tertib administrasi pertanahan	%	-	-	66	54,4	57,3	62,3	67,3	88,27	54,4	57,3	62,09	71,21	133,74	100,00	100,00	99,66	105,81

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
		13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
3	Satuan kinerja	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**21.080.214.996**	**21.394.636.131**	**22.686.142.491**	**23.191.843.180**	**28.063.538.375**	**17.483.909.252**	**18.675.172.584**	**18.827.868.965**	**19.434.982.036**	**9.405.118.396**	**82,94%**	**87,29%**	**82,99%**	**83,80%**	**33,51%**	**0,022**	**0,032**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.618.920	111.435.860	106.850.100	220.585.676	189.146.400	36.946.500	93.587.000	96.960.201	209.614.331	18.128.905	88,77%	83,98%	90,74%	95,03%	9,58%	1,064	1,162
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.302.664.556	12.774.376.430	13.104.563.687	16.415.618.028	24.672.543.386	12.439.174.108	12.335.700.832	12.728.804.456	14.806.523.015	9.024.109.890	93,51%	96,57%	97,13%	90,20%	36,58%	0,253	0,163
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	956.277.580	791.029.485	583.065.295	191.829.100		792.539.707	527.864.100	523.235.734	36.000.000		82,88%	66,73%	89,74%	18,77%	- 0,263	- 0,009
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.294.992.898	6.255.691.181	6.605.055.300	3.852.158.657	1.849.973.153	4.235.762.379	4.562.871.877	3.891.906.716	2.673.870.211	88.355.829	67,29%	72,94%	58,92%	69,41%	4,78%	- 0,417	- 0,313
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.291.622	625.686.740	952.307.940	947.678.492	429.737.237	374.451.141	372.974.404	565.025.267	554.153.728	50.054.358	61,97%	59,61%	59,33%	58,47%	11,65%	- 0,005	- 0,019
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.647.000	671.168.340	1.126.335.979	1.172.737.032	730.309.099	397.575.124	517.498.764	1.017.308.225	667.585.017	188.469.414	47,52%	77,10%	90,32%	56,93%	25,81%	0,041	- 0,344
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**172.732.167.386**	**165.299.837.223**	**78.349.063.117**	**74.234.412.896**	**121.452.208.013**	**114.118.096.061**	**135.971.434.379**	**59.388.499.224**	**52.319.174.650**	**10.447.484.868**	**66,07%**	**82,26%**	**75,80%**	**70,48%**	**8,60%**	**- 0,053**	**- 0,119**
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	172.732.167.386	165.299.837.223	78.349.063.117	74.234.412.896	121.452.208.013	114.118.096.061	135.971.434.379	59.388.499.224	52.319.174.650	10.447.484.868	66,07%	82,26%	75,80%	70,48%	8,60%	- 0,053	- 0,119
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**3.354.827.750**	**1.027.003.018**	**3.357.808.798**	**670.595.866**	**616.483.389**	**3.120.748.559**	**1.013.917.395**	**2.970.749.941**	**613.737.307**	**30.750.300**	**93,02%**	**98,73%**	**88,47%**	**91,52%**	**4,99%**	**- 0,800**	**- 0,793**
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.354.827.750	1.027.003.018	3.357.808.798	670.595.866	616.483.389	3.120.748.559	1.013.917.395	2.970.749.941	613.737.307	30.750.300	93,02%	98,73%	88,47%	91,52%	4,99%	- 0,800	- 0,793
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**134.940.464**	**946.307.548**	**2.110.015.912**	**1.185.862.940**	**537.183.946**	**63.923.351**	**668.934.940**	**1.470.580.180**	**797.980.100**	**148.529.800**	**47,37%**	**70,69%**	**69,70%**	**67,29%**	**27,65%**	**- 0,438**	**- 0,457**
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	134.940.464	946.307.548	2.110.015.912	1.185.862.940	537.183.946	63.923.351	668.934.940	1.470.580.180	797.980.100	148.529.800	47,37%	70,69%	69,70%	67,29%	27,65%	- 0,438	- 0,457
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**13.308.698.792**	**8.501.861.432**	**9.708.636.670**	**6.917.735.415**	**2.201.517.205**	**8.245.353.560**	**8.028.733.933**	**9.441.372.188**	**6.405.858.994**	**125.925.207**	**61,95%**	**94,44%**	**97,25%**	**92,60%**	**5,72%**	**- 0,287**	**- 0,322**
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	6.497.662.290	4.336.801.461	5.365.014.938	3.828.418.166	1.000.000.000	2.652.050.602	4.262.600.250	5.316.444.056	3.547.157.392	21.729.200	40,82%	98,29%	99,09%	92,65%	2,17%	- 0,286	- 0,333

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		490.796.614	319.453.986	1.570.666.807	700.000.000		395.462.312	315.982.550	1.486.184.056	17.170.249		80,58%	98,91%	94,62%	2,45%	3,917	3,703
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5.358.503.795	2.711.448.015	1.911.947.906	580.650.297	200.000.000	4.560.827.858	2.457.972.871	1.737.881.507	531.689.650	24.838.300	85,11%	90,65%	90,90%	91,57%	12,42%	-0,696	-0,694
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.452.532.707	962.815.342	2.112.219.840	938.000.145	301.517.205	1.032.475.100	912.698.500	2.071.064.075	840.827.896	62.187.458	71,08%	94,79%	98,05%	89,64%	20,62%	-0,556	-0,594
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**681.427.723**	**341.566.668**	**1.005.043.509**	**690.642.406**	**327.300.000**	**520.298.001**	**300.066.979**	**908.362.225**	**650.109.550**	**190.521.300**	**76,35%**	**87,85%**	**90,38%**	**94,13%**	**58,21%**	**-0,313**	**-0,284**
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	681.427.723	341.566.668	1.005.043.509	690.642.406	327.300.000	520.298.001	300.066.979	908.362.225	650.109.550	190.521.300	76,35%	87,85%	90,38%	94,13%	58,21%	-0,313	-0,284
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**-**	**466.438.870**	**6.558.241.476**	**30.000.000**	**448.553.274**	**-**	**446.172.164**	**6.301.309.206**	**22.899.500**	**28.079.300**		**95,66%**	**96,08%**	**76,33%**	**6,26%**	**-0,995**	**-0,996**
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		466.438.870	6.558.241.476	30.000.000	448.553.274		446.172.164	6.301.309.206	22.899.500	28.079.300		95,66%	96,08%	76,33%	6,26%	-0,995	-0,996
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**-**	**2.510.341.147**	**779.477.394**	**851.342.836**	**240.130.720**	**-**	**2.416.474.379**	**696.531.196**	**789.256.122**	**48.450.696**		**96,26%**	**89,36%**	**92,71%**	**20,18%**	**0,092**	**0,133**
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.404.773.385	779.477.394	851.342.836	240.130.720		2.314.411.379	696.531.196	789.256.122	48.450.696		96,24%	89,36%	92,71%	20,18%	0,092	0,133
Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		105.567.762					102.063.000					96,68%					
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	**-**	**105.567.762**	**15.654.997.322**	**-**	**-**	**-**	**102.247.000**	**6.218.866.850**				**96,85%**	**39,72%**			**-1,000**	**-1,000**
Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota		105.567.762	15.654.997.322				102.247.000	6.218.866.850				96,85%	39,72%			-1,000	-1,000

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**28.540.449.967**	**14.745.361.003**	**313.621.984**	**117.000.000**	**150.094.000**	**18.053.837.440**	**6.123.830.199**	**303.038.000**	**107.166.250**	**103.552.100**	**63,26%**	**41,53%**	**96,63%**	**91,60%**	**68,99%**	**-0,627**	**-0,646**
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		20.148.026	198.575.714	17.000.000	16.500.000		5.555.335	193.397.350	12.261.500	3.908.200		27,57%	97,39%	72,13%	23,69%	-0,914	-0,937
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	28.540.449.967	14.725.212.977	115.046.270	100.000.000	133.594.000	18.053.837.440	6.118.274.864	109.640.650	94.904.750	99.643.900	63,26%	41,55%	95,30%	94,90%	74,59%	-0,131	-0,134
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**-**	**1.177.299**	**-**	**156.170.868**	**-**	**-**	**1.069.000**	**-**	**139.290.500**	**-**		**90,80%**		**89,19%**			
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		1.177.299		156.170.868			1.069.000		139.290.500			90,80%		89,19%			
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**-**	**3.531.897**	**142.233.416**	**166.000.000**	**16.969.000**	**-**	**3.207.000**	**48.007.050**	**159.389.800**	**3.832.200**		**90,80%**	**33,75%**	**96,02%**	**22,58%**	**0,167**	**2,320**
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		3.531.897	142.233.416	166.000.000	16.969.000		3.207.000	48.007.050	159.389.800	3.832.200		90,80%	33,75%	96,02%	22,58%	0,167	2,320

Keterangan:

1	Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
3	Anggaran tahun kedua renstra disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
4	Anggaran tahun ketiga renstra disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
5	Anggaran tahun keempat renstra disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
6	Anggaran tahun elima renstra disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keternagan 2-6
7	Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keternagan 7 -11
8	Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun		
9	Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun		
11	Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

C. Mitra Dinas Penataan Ruang dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah bagian vital dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat akan memastikan penataan ruang yang adil, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan warga kota

Mitra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam pecapaian tugas fungsi Perangkat Daerah yang menggambarkan proses bisnis Perangkat Daerah antara lain:

1) Instansi Pemerintah Lain (Lintas OPD)
   - Dinas Pekerjaan Umum (PU): Sinkronisasi rencana jalan, drainase, dan infrastruktur.
   - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim): Kolaborasi dalam rencana kawasan permukiman.
   - DPMPTSP (Perizinan Terpadu): Sinkronisasi rekomendasi KKPR dengan sistem perizinan OSS.
   - Dinas Lingkungan Hidup: Koordinasi dalam kajian lingkungan (KA-ANDAL, DPLH).
   - Bappeda: Integrasi rencana tata ruang dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD).
   - Satpol PP: Penegakan aturan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

2) Lembaga Vertikal / Pemerintah Pusat
   - Kementerian ATR/BPN: Sinkronisasi RTRW, RDTR, dan kebijakan nasional.
   - Kementerian PUPR: Dukungan teknis dan program nasional berbasis tata ruang.
   - BPN (Badan Pertanahan Nasional): Penyesuaian antara peta bidang tanah dengan tata ruang.

3) Akademisi dan Perguruan Tinggi
   - Universitas seperti UNDIP, Unika Soegijapranata, UIN Walisongo, dan lainnya berperan dalam:
     - Kajian teknis tata ruang
     - Naskah akademik revisi RTRW/RDTR
     - Pendidikan dan sosialisasi

4) Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas
   - Komunitas urban planning, arsitektur, lingkungan dan LSM yang bergerak dalam isu tata kota dan ruang terbuka hijau.
   - Mendorong partisipasi publik dan pengawasan sosial.

5) Sektor Swasta dan Dunia Usaha
   - Pengembang properti dan investor dalam pelaksanaan pembangunan sesuai RTR.
   - Konsultan perencana dan pengawas (perusahaan jasa konsultan tata ruang).
   - Pelaku usaha yang perlu mengikuti zonasi dan ketentuan pemanfaatan ruang.

6) Masyarakat Umum
   - Pelibatan dalam Musrenbang, Forum Konsultasi Publik, dan sosialisasi revisi RTRW/RDTR.
   - Peningkatan kesadaran hukum terkait penataan ruang.

D. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Dinas Penataan Ruang

Dukungan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terhadap Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sangat penting dalam mewujudkan tata ruang yang terencana, fungsional, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut ini penjelasan mengenai peran dan bentuk dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang:

Peran Strategis BUMD dalam Penataan Ruang adalah menjadi mitra penting dalam:

1) Pelaksanaan rencana tata ruang (implementasi RTRW/RDTR)
2) Penyediaan infrastruktur dasar
3) Revitalisasi kawasan strategis
4) Pemanfaatan aset daerah secara optimal dan sesuai zonasi
5) Penguatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan ruang yang mendukung investasi

Dukungan BUMD sangat penting untuk:

1) Mengimplementasikan rencana tata ruang secara konkret
2) Menyediakan layanan publik berbasis tata ruang
3) Mengoptimalkan aset daerah dengan tetap taat pada ketentuan zonasi dan pemanfaatan ruang.

Tabel 2.1.
Bentuk Dukungan Nyata BUMD terhadap Kinerja Dinas Penataan Ruang

Bentuk Dukungan	**Keterangan**
Implementasi Proyek Sesuai RTRW/RDTR	BUMD melaksanakan pembangunan aset atau kawasan sesuai rencana tata ruang, misalnya pembangunan sentra ekonomi atau air bersih.
Penyediaan Data & Informasi	Memberikan data kebutuhan ruang/infrastruktur (misalnya jaringan air bersih PDAM) untuk integrasi dalam perencanaan ruang.
Kolaborasi dalam Program Penataan Kawasan	Bersama dinas melakukan penataan kawasan kumuh, pasar, atau daerah rawan banjir sesuai rencana detail tata ruang (RDTR).
Optimalisasi Aset Daerah	Pengelolaan lahan atau bangunan milik Pemkot agar sesuai zonasi dan mendukung fungsi ruang.
Sosialisasi & Edukasi Publik	Ikut menyebarluaskan pemahaman pentingnya tata ruang, terutama pada masyarakat pengguna jasa BUMD.

Berikut BUMD yang terlibat langsung/tidak langsung dalam mendukung Dinas Penataan Ruang:

1) PT Sarana Patra Hulu Semarang (SPHS)
   - Mengelola dan mengembangkan aset Pemkot di bidang energi dan infrastruktur.
   - Relevan dalam perencanaan tata ruang kawasan energi dan kawasan industri.
2) PT BPR BKK Semarang
   - Mendukung pelaku usaha kecil menengah yang memanfaatkan ruang sesuai dengan izin dan zonasi.
   - Pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan permukiman atau campuran.
3) PDAM Tirta Moedal
   - Penyediaan air bersih untuk mendukung perencanaan dan pembangunan permukiman sesuai tata ruang.
   - Masukan teknis untuk kesesuaian tata ruang dengan infrastruktur air bersih.
4) Perumda Pasar Jaya (atau Pasar Daerah)
   - Revitalisasi pasar tradisional agar sesuai dengan zonasi dan rencana kawasan strategis perkotaan.
   - Berperan dalam penataan kawasan perdagangan dan jasa.
5) PT PRPP (Pengelola Kawasan PRPP – walau dominannya milik provinsi)
   - Mengelola kawasan pesisir dan pariwisata di perbatasan Kota Semarang.
   - Kolaborasi dalam penataan ruang pesisir dan reklamasi.

E. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Penataan Ruang

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tidak hanya mengatur tata ruang di dalam kota, tapi juga harus berkoordinasi lintas daerah, lintas level pemerintahan, dan dengan pihak non-pemerintah supaya pemanfaatan ruang lebih terarah.

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang bertanggung jawab pada kerjasama yang menyangkut sinkronisasi dan pengendalian tata ruang antarwilayah, terutama dalam lingkup Kawasan Kedungsepur, kawasan pesisir, kawasan lindung, dan kawasan strategis nasional/provinsi yang ada di Kota Semarang.

Secara umum, bentuk kerjasama daerah bidang penataan ruang meliputi:

1) Kerjasama Antar-Daerah (KAD)
   - Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar Semarang (misalnya: Kab. Semarang, Demak, Kendal, Salatiga, dan sekitarnya).
     - Penataan kawasan perkotaan metropolitan Kedungsepur (Kendal–Demak–Ungaran–Salatiga–Semarang–Purwodadi), contohnya: (1) Penyusunan RTR Kawasan Kedungsepur untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, transportasi, dan kawasan permukiman, (2) Pengelolaan kawasan pesisir Semarang–Demak misalnya pembangunan tanggul laut dan pengendalian banjir rob.

- Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan (misalnya pengaturan kawasan industri, perdagangan, permukiman).
- Perlindungan kawasan lindung, sempadan sungai, pesisir, dan daerah resapan air yang melintasi batas wilayah.

2) Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
   - Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah.
   - Pengelolaan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kota Semarang (contohnya penataan Bawen–Semarang Toll Corridor sebagai jalur ekonomi utama Jateng).

3) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat
   - Terkait Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Semarang, misalnya Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, jalur transportasi nasional, dan infrastruktur strategis lainnya.
   - Penyusunan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Kedungsepur (bersama Bappenas, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR) misalnya Program Pembangunan NCICD (*National Capital Integrated Coastal Development*) di Semarang–Demak untuk perlindungan pesisir dari banjir rob.

4) Kerjasama dengan Swasta & Masyarakat
   - Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) misalnya taman kota atau jalur hijau.
   - Kemitraan dalam pembangunan perumahan, kawasan industri, dan kawasan wisata yang sesuai tata ruang misalnya (1) kerjasamana dalam pengelolaan Kawasan industri (Kawasan Industri Wijayakusuma) berupa penyesuaian tata ruang dengan kebutuhan investasi, (2) Kemitraan dengan masyarakat dalam program penataan kampung kota dan normalisasi sungai.

F. Inovasi Dinas Penataan Ruang

Berikut beberapa inovasi terkini yang digagas oleh Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, dan akses terhadap tata ruang kota:

1) Aplikasi Peta Digital Tata Ruang

   Distaru menghadirkan aplikasi *peta digital* yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi seputar tata ruang, seperti batas wilayah, zonasi, nilai jual objek pajak, dan potensi investasi yang dapat diakses langsung melalui smartphone, tanpa perlu datang ke kantor. Aplikasi ini sangat memudahkan masyarakat dan investor mendapatkan data terkini dan akurat secara mandiri.

2) Tata Ruang Pro Investasi Berbasis IT

   Sebagai langkah konkret untuk mendorong iklim investasi, Distaru meluncurkan sistem "Tata Ruang Pro Investasi" berbasis teknologi informasi yang memungkinkan investor melakukan simulasi investasi dan pengecekan kelayakan berdasarkan zonasi tata ruang, serta menyiapkan proses perizinan secara daring. Sistem ini juga dirancang untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kualitas layanan publik terus meningkat secara berkelanjutan.

3) Mengintegrasikan RDTR dengan OSS

Semarang berhasil meraih predikat Penataan Ruang Terbaik se-Jawa Tengah 2023 dengan nilai tinggi dalam sistem pengawasan berbasis web (Siswatek) berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian tata ruang. Salah satu poin pentingnya adalah penyusunan 4 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang meliputi kawasan heritage (Kota Lama), kawasan bahari (Tambaklorok), dan kompleks investasi di Kecamatan Tugu. Distaru juga berencana menyusun Peraturan Wali Kota sebagai panduan teknis penataan ruang yang terintegrasi dengan sistem OSS (*Online Single Submission*), demi percepatan dan penyederhanaan proses perizinan.

4) Kompetisi Inovasi Tata Ruang

Untuk memicu solusi kreatif atas masalah tata ruang lokal, Distaru menyelenggarakan kompetisi inovasi. Salah satu pemenangnya adalah mahasiswa yang mengusulkan sistem kolam retensi dengan jaring otomatis dan mesin pencacah sampah berbasis sensor, ditujukan untuk mengatasi banjir rob di Kecamatan Genuk. Menariknya, konsep ini juga memadukan solusi tahan bencana dan pengelolaan limbah yang sangat relevan dengan tantangan penurunan muka tanah, resapan air, dan sampah di pesisir Semarang.

5) Sayembara Desain Bangunan Gedung Hijau (BGH) Kantor Kelurahan Bulu Lor Kota Semarang.

Kompetisi arsitektur yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Tujuannya adalah mempromosikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang rendah emisi karbon, ramah lingkungan, hemat energi, dan berkelanjutan, khususnya untuk fasilitas pemerintahan berskala kecil. Dengan memanfaatkan ajang ini, Dinas Penataan Ruang berharap nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dapat ditanamkan sejak dini, terutama kepada mahasiswa arsitektur di seluruh Indonesia.

G. Penghargaan Dinas Penataan Ruang

Berikut adalah beberapa penghargaan penting yang telah diterima oleh Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang atau yang terkait langsung dengan kinerjanya dalam bidang penataan ruang dan inovasi tata kota:

1) Juara I – Penataan Ruang Terbaik se-Jawa Tengah (2023)

Kota Semarang meraih posisi pertama sebagai Kabupaten/Kota dengan pengelolaan penataan ruang terbaik dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Pusdataru Jateng). Penghargaan ini diserahkan bertepatan dengan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU), dan merupakan apresiasi atas komitmen kota dalam menciptakan tata ruang yang nyaman dan berkelanjutan.

2) Penghargaan Bhumandala Rajata – Penghargaan Nasional dari BIG (2023)

Distaru Kota Semarang meraih medali perak (Bhumandala Rajata) dalam Bhumandala Awards 2023, sebuah penghargaan

nasional dari Badan Informasi Geospasial (BIG), atas inovasi *Comprehensive Geospatial Information System* (CGIS). Sistem ini telah meningkatkan efektivitas perencanaan tata ruang, percepatan perizinan, dan akurasi penunjukan lokasi secara daring.

3) Penghargaan UI Green City Metric – Kota Paling Berkelanjutan (2023)

   Universitas Indonesia (UI) memberikan penghargaan *Green City Metric* 2023 kepada Kota Semarang sebagai kota paling berkelanjutan di Indonesia dalam kategori penataan ruang dan infrastruktur. Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan terhadap upaya kota dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

4) Penghargaan Pelestarian Berkelanjutan Kawasan Cagar Budaya (2023)

   Diberikan oleh Kementerian PUPR, penghargaan ini diberikan kepada Pemkot Semarang atas komitmen dalam pelestarian berkelanjutan kawasan Kota Tua Semarang. Selain itu, kota memperoleh tambahan program pembangunan dari Kementerian tersebut senilai Rp 5 miliar untuk tahun 2024.

5) Penghargaan Bhumandala Award – Inovasi Geospasial (2017)

   Pada tahun 2017, Distaru Kota Semarang juga mendapatkan Bhumandala Award (penghargaan nasional dari BIG) atas inovasi KRK Online (sistem perizinan berbasis geospasial), yang meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perizinan tata ruang.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

A. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai berikut:

1) Perubahan iklim global salah satunya akibat emisi karbon dari bangunan gedung;
2) Pencapaian tujuan reforma agraria;
3) Koordinasi lintas wilayah karena ada perbedaan kepentingan antara investasi, lingkungan, dan kebutuhan sosial;
4) Dinamika pembangunan dan pengembangan wilayah salah satunya akibat tekanan pembangunan dan investasi;
5) Keterbatasan Anggaran dan SDM;
6) Koordinasi Lintas Sektor;
7) Peningkatan pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada alih fungsi tata guna lahan;
8) Pembagian kewenangan antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Semarang;

B. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Posisi Strategis Kota Semarang
   - Sebagai Ibu Kota Jawa Tengah, pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa.
   - Jalur utama transportasi Pantura (Tol Trans Jawa, pelabuhan, bandara, kereta api).
   - Termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN Kedungsepur).
2) Dukungan Regulasi & Teknologi
   - Adanya RTRW & RDTR yang semakin terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission).
   - Inovasi digital seperti peta tata ruang online, KRK Online, CGIS.
   - Semarang masuk dalam program Smart City Nasional sehingga ada peluang untuk mengembangkan sistem informasi geospasial dalam tata ruang.
3) Peluang Investasi
   - Kawasan industri (Wijayakusuma, Tugu, Genuk) menarik investor.
   - Pusat perdagangan (Simpang Lima, Kota Lama, Tanjung Emas) dengan potensi wisata heritage.
   - Pusat pendidikan tinggi (UNDIP, Unnes, Unika Soegijapranata, UIN Walisongo.
   - Program Tol Trans Jawa melewati Semarang dan Rencana Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun kereta & BRT Trans Semarang.
4) Pengembangan Kawasan Metropolitan Kedungsepur
   - Kolaborasi regional (Kendal–Demak–Ungaran–Salatiga–Semarang–Purwodadi).
   - Mendukung integrasi transportasi dan tata ruang lintas daerah.
5) Potensi Lingkungan & Pariwisata
   - Wisata heritage Kota Lama, wisata bahari Tambaklorok, dan alam Gunung Ungaran.
   - Rencana pembangunan Bangunan Gedung Hijau (BGH) seperti di Bulu Lor sebagai momentum transisi kota hijau.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yaitu: “Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah Yang Berdayaguna Dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Rumusan Permasalahan
"Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah Yang Berdayaguna Dan Berkelanjutan"

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	Masih rendahnya ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan perijinan bangunan gedung	Masih banyaknya Bangunan Gedung yang Diduga Cagar Budaya (BDCB) yang belum ditetapkan sebagai BCB
		Belum optimalnya regulasi teknis terkait bangunan gedung
		Kurangnya pengawasan penyelenggaraan tata ruang
		Belum optimalnya perijinan PBG
2	Belum tertatanya bangunan dan lingkungannya	Masih awamnya masyarakat terkait ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan KRK
3	Masih terdapat penyelenggaraan jasa konstruksi yang belum memenuhi standart	Belum optimalnya pelaku jasa konstruksi yang mendapat sertifikat
4	Belum optimalnya implementasi prinsip keandalan gedung dalam pembangunan BGN dan ramah gender	Belum tertibnya legalitas dan tata kelola BGN
		Belum optimalnya pemeliharaan BGN untuk kepentingan strategis daerah
		Masih rendahnya integrasi fungsi BGN dengan rencana tata ruang serta pengembangan kawasan strategis
		Belum optimalnya Perencanaan pembangunan BGN
5	Belum optimalnya kesesuaian pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang	Masih adanya ketidaksesuaian subtansi RTRW terhadap dinamika kebijakan
		Belum optimalnya penyediaan data dan informasi tata ruang
		Belum optimalnya informasi geospasial
		Belum terpenuhinya peta tematik dan informasi geospasial
		Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengawasan tata ruang
		Belum optimalnya koordinasi linsek penataan ruang dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
		Belum optimalnya peran FPRD
6	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan urusan pertanahan	Belum optimalnya Pengendalian dan penanganan sengketa
		Belum optimalnya database bidang pertanahan
7	Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Belum tuntasnya sertifikat tanah yang berasal dari pengadaaan lahan
8	Belum optimalnya penatagunaan tanah	Belum optimalnya perencanaan penggunaan tanah
9	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Dinas Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan PD
		Belum optimalnya koordinasi penyusunan RKA
		Belum optimalnya koordinasi penyusunan DPA
		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi PD
		Belum optimalnya ketersediaan data sektoral
		Belum optimalnya ketersediaan gaji dan tunjangan ASN

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
		Belum tersedianya administrasi tugas ASN
		Belum optimalnya kualitas pelaporan keuangan
		Belum optimalnya prognosis relisasi anggaran
		Belum optimalnya administrasi kepegawaian
		Masih rendahnya kualitas SDM
		Belum optimalnya ketersediaan logistik kantor
		Belum optimalnya ketersediaan barang cetak dan penggandaan
		Belum optimalnya fasilitasi kunjungan tamu
		Belum optimalnya penyelenggaraan rakor dan konsultasi
		Belum terimplementasinya teknologi informasi dan informasi geospasial
		Belum optimalnya ketersediaan peralatan dan mesin kantor
		Belum optimalnya ketersediaan jasa pelayanan kantor
		Belum optimalnya jasa pelayanan umum
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD kantor

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

A. Telaahan RPJMN 2025-2029

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang disahkan pada 10 Februari 2025 mengandung visi: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

Visi tersebut selanjutnya diwujudkan melalui delapan misi (Asta Cita):

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi & HAM
2) Mendorong kemandirian bangsa (pangan, energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, biru)
3) Mengembangkan infrastruktur & lapangan kerja inklusif
4) Meningkatkan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan inklusi sosial
5) Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
6) Pembangunan dari desa untuk pemerataan
7) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
8) Menjaga harmoni sosial, lingkungan, dan budaya inklusif

RPJMN menekankan 8 Asta Cita misi pembangunan. Yang paling terkait dengan dinas penataan ruang adalah:

Tupoksi Dinas Penataan Ruang Semarang	Keterkaitan dengan RPJMN 2025–2029
Menyusun RTRW, RDTR, dan rencana detail kawasan	Mendukung *Misi 3 & 6* → infrastruktur terintegrasi, pengembangan kawasan perkotaan & peri-urban
Pengendalian pemanfaatan ruang (perizinan, kesesuaian tata ruang)	Mendukung *Misi 2 & 8* → jaminan ketahanan pangan/air, pencegahan alih fungsi lahan, mitigasi bencana
Menyediakan ruang terbuka hijau & kawasan lindung	Mendukung *Misi 8* → kota berketahanan iklim, mendukung target net zero emission
Penataan kawasan permukiman & perumahan	Mendukung *Quick Wins* → hunian murah, kota layak huni
Pengawasan dan penegakan pemanfaatan ruang	Mendukung *Misi 7* → reformasi tata kelola ruang yang transparan & berbasis hukum
Kerja sama tata ruang lintas daerah (Metropolitan Kedungsepur)	Mendukung *Misi 6* → pembangunan wilayah berbasis konektivitas & pemerataan ekonomi regional

Tupoksi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sangat erat dengan RPJMN 2025–2029, terutama pada misi infrastruktur, pemerataan wilayah, ketahanan lingkungan, dan kota berkelanjutan. Dengan demikian, Dinas Penataan Ruang menjadi garda depan dalam menerjemahkan visi Indonesia Emas 2045 ke dalam wujud nyata ruang kota yang inklusif, produktif, dan hijau. Adapun arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang menjadi prioritas utama Pembangunan Nasional antara lain:

1) Kota hijau dan berketahanan iklim;
2) Infrastruktur terintegrasi dan efisien;
3) Pencegahan alih fungsi lahan produktif;
4) Penyediaan hunian terjangkau dan layak;
5) Tata kelola ruang transparan dan partisipatif; dan
6) Pemerataan pembangunan kawasan.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif"

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

Tujuan : Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat

Sasaran : Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator kinerja daerah yaitu Angka pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis melalui perhitungan Tingkat pengembangan kawasan strategis.

C. Telaahan Renstra Kementrian PUPR dan Kementrian ATR/BPN

Visi Renstra PUPR 2025–2029: Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkelanjutan.

Visi ini diimplementasikan melalui strategi yang disebut “PU608”:
6: Efisiensi investasi dengan target ICOR < 6
0: Pengentasan kemiskinan menuju 0%
8: Mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8% per tahun

Renstra PUPR 2025–2029 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025–2029) serta 8 misi prioritas nasional (Asta Cita) dan 17 program prioritas, serta 8 program *quick wins* dan 320 program kerja.

Salah satu program kerjanya yang bersinggungan langsung dengan Dinas Penataan Ruang adalah Penyediaan Prasarana Strategis (PN4): termasuk fasilitas pendidikan, sekolah, pasar, gedung dan kawasan publik.

7 Arah Kebijakan Strategis yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN periode 2025–2029 antara lain:

1) Perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah.
2) Optimalisasi Reforma Agraria.
3) Peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan.
4) Peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan serta ruang berbasis digital untuk meningkatkan pelayanan publik.
5) Mitigasi dan pencegahan sengketa atau konflik pertanahan.
6) Reformasi birokrasi berbasis merit system dan perbaikan SDM.
7) Pencapaian penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis tata ruang nasional dan daerah, mendukung pembangunan ekonomi inklusif serta berkelanjutan, termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim dan ekonomi hijau

Prioritas utama Kementrian ATR/BPN untuk rencana jangka menangh antara lain: Reforma agraria, digitalisasi data, pendaftaran tanah, pengendalian pemanfaatan ruang, penataan ruang inklusif dan berkelanjutan.

D. Telaahan Renstra PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satu isu strategis yang diangkat adalah Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang.

Maka tujuan Jangka Menengah dari Renstra Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah adalah:

a) Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
b) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air
b) Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang
c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
d) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Berkaitan dangan Penataan Ruang, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah memiliki arah kebijakan antara lain:

- Peningkatan Pemahaman Sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Penataan Ruang;
- Peningkatan Pemahaman masyarakat terkait penataan ruang;
- Penyesuaian substansi RTRWP dengan dinamika Kebijakan;
- Melaksanakan Kajian-Kajian dalam rangka revisi RTRWP;
- Melaksanakan Evaluasi rancangan perda/perkada tentang RTR Kab/Kota;
- Mendorong Intervensi Tata Ruang dalam penyusunan rencana pemb sektoral
- Melaksanakan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
- Melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Meningkatkan kualitas data geospasial;
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Peningkatan koordinasi kelembagaan penataan ruang ;
- Optimalisasi perijinan pemanfaatan ruang;

E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Penataan Ruang

Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Semarang adalah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut:

Perencanaan tata ruang wilayah memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
3. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan startegis.

Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, meliputi :

1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional, meliputi :
   a. Menerapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
   b. Mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
   c. Mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
   d. Mengembangkan kegiatan Pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
   e. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
   f. Mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
2. Peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan, meliputi:
   a. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
   b. Mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) jalan lingkar tengah (middle ring road), jalan lingkar luar (outer ring road), dan jalan radial;
   c. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
   d. Mengembangkan sistem transportasi massal;

e. Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
f. Mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhanlaut; dan meningkatkan integrasi sistem antar moda.

3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum, meliputi:
   a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
   b. Mengembangkan sistem prasarana energi;
   c. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi padakawasan pertumbuhan ekonomi;
   d. Mengembangkan prasarana sumber daya air;
   e. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik teknik yang berwawasan lingkungan;
   f. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum; g) meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
   g. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

b) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang, meliputi :

1. Kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan lindung, meliputi :
   a. Peningkatan pengelolaan Kawasan yang berfungsi lindung, meliputi:
      - Mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
      - Meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
      - Menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.
   b. Pelestarian Kawasan cagar budaya, meliputi:
      - Meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
      - Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
   c. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota, meliputi:
      - Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
      - Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
      - Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
      - Mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat;
      - Mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau;dan
      - Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

2. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan budidaya, meliputi:
    a. Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan dayadukung dan daya tampung, meliputi:
        - Mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;
        - Mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
        - Membatasi pengembangan kawasan industri.
    b. Pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien, meliputi:
        - Mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal dikawasan pusat kota; dan
        - Mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif
    c. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai, meliputi:
        - Mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat;
        - Mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob; dan
        - Melakukan penghijauan kawasan pantai.

c) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi:

1. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi :
    a. Menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan
    b. Mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorongperannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.
2. Pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
    a. Mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
    b. Mengatur pemanfaatan Kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
    c. Meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial Kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
3. Pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
    a. memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
    b. Mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian; dan
    c. Pengembangan kegiatan kepariwisataan.

d) Rencana Struktur Ruang, meliputi :

1. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan, meliputi :
    a. Rencana pembagian wilayah kota (BWK) Rencana pembagian wilayah kota (BWK) meliputi:

- BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan;
- BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur;
- BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara;
- BWK IV meliputi Kecamatan Genuk;
- BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan;
- BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang;
- BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik;
- BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati;
- BWK IX meliputi Kecamatan Mijen; dan
- BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.

b. Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing BWK meliputi:
- Perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, BWK II, BWK III;
- Pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II;
- Transportasi udara dan transportasi laut di BWK III;
- Industri di BWK IV dan BWK X;
- Pendidikan di BWK VI dan BWK VIII;
- Perkantoran militer di BWK VII; dan
- Kantor pelayanan publik di BWK IX

2. Rencana pengembangan sistem jaringan, meliputi :
- Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
- Rencana pengembangan sistem jaringan energi;
- Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- Rencana pengembangan pengembangan sistem infrastruktur
- Perkotaan; dan
- Rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan
  lainnya

Tabel 2. 9 Indikasi Program Kewilayahan Yang Akan Dilaksanakan Di Tahun 2025-2029 Dalam Dokumen RTRW

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM-4						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I	**PENYUSUNAN MATEK REVISI RTRW**								**APBD**	**Dinas Penataan Ruang**
II	**LEGALISASI PERDA PERUBAHAN RTRW**								**APBD**	**Dinas Penataan Ruang**
	Pengembangan jasa pameran *(exhibition center)* dan jasa pertemuan *(convention center)*	Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur							APBD	Bappeda, Dinas Penataan Ruang

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM-4						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		dan Kecamatan Semarang Utara								
	Pengembangan kawasan perkantoran Pemerintah Kota	Kecamatan Mijen							APBN, APBD	Bappeda, Dinas Penataan Ruang
	Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh Daerah	Seluruh Wilayah Kota							APBN, APBD	Bappeda, Dinas Penataan Ruang
	Peningkatan kawasan balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD serta Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan peyediaan terbuka publik	Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan							APBN, APBD Prov, APBD	Bappeda, Dinas Penataan Ruang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
	Peningkatan Gelanggang Olah Raga Jatidiri	Kecamatan Gajahmungkur							APBN, APBD	Dinas Penataan Ruang
	Peningkatan Stadion Citarum	Kecamatan Semarang Timur							APBD	Dinas Penataan Ruang
	Peningkatan Stadion Tri Lomba Juang	Kecamatan Semarang Tengah							APBD	Dinas Penataan Ruang
	peningkatan Stadion Diponegoro	Kecamatan Semarang Tengah							APBD	Dinas Penataan Ruang
	Peningkatan Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati	Kecamatan Pedurungan							APBD	Dinas Penataan Ruang
	Pengembangan Pusat Olah Raga	Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Mijen							APBD	Dinas Penataan Ruang
	Pengembangan kawasan olah raga beskala BWK dan lingkungan	Seluruh Kota							APBD, Swasta	Dinas Penataan Ruang
	Pengembangan ruang terbuka non hijau	Sekuruh Kota							APBD	Dinas Penataan Ruang
	Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi	Pusat Kota							APBD, Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang
	Pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas	Kecamatan Semarang Utara							APBD, Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang
	Pengembangan kawasan Waduk Jatibarang	Kecamatan Gunungpati							APBD, Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang
	Pengembangan kawasan reklamasi pantai	Kecamatan Semarang Utara							APBD, Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang
	Pengembangan kawasan Kota Lama	Kecamatan Semarang Utara							APBD, Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang

F. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat

pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Berdasarkan KLHS, isu yang terkait dengan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah terkait Misi 3 yaitu Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan hidup, berkelanjutan dan mendukung kemajuan kota dan SDG 11: Kota dan permukiman berkelanjutan dengan indikator kota rendah emisi.

Isu emisi karbon akibat bangunan gedung di Kota Semarang menjadi krusial karena pertumbuhan urbanisasi dan pembangunan vertikal. Dinas Penataan Ruang memiliki posisi strategis sebagai regulator tata ruang & bangunan untuk mengendalikan emisi melalui perencanaan, perizinan, serta mendorong penerapan Bangunan Gedung Hijau.

Isu Utama meningkatnya Emisi Karbon akibat bangunan gedung antara lain:

1) Tingginya konsumsi energi gedung perkantoran & komersial, misal: penggunaan AC, lift, dan pencahayaan buatan sangat dominan.
2) Pertumbuhan gedung vertikal (apartemen, hotel, mal) tanpa standar hijau memadai.
3) Kurangnya penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) sesuai Permen PUPR No. 21/2021.
4) Keterbatasan insentif untuk mendorong pengembang membangun gedung ramah lingkungan.
5) Kawasan pesisir (Semarang Utara) yang rentan rob sehingga bangunan butuh energi tambahan untuk proteksi, drainase, dan pompa yang implikasinya menambah emisi.

Tabel 2. 10 Tema Isu KLHS terhadap Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Isu Strategis dari Kondisi Lingkungan Hidup: Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	**Bangunan gedung** menyumbang signifikan pada emisi karbon (+30%), utamanya dari: • Konsumsi listrik (pendingin udara, pencahayaan, peralatan elektronik). • Material konstruksi (semen, baja, kaca) yang bersifat *embodied carbon*. • Operasional gedung yang tidak efisien energi.
Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan	Isu TBP: 1) Masih kurangnya dukungan terhadap energi alternatif berkelanjutan. 2) Masih kurangnya dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan ruang terbuka hijau (RTH). Perlu strategi pengadaan RTH agar mencapai 30% Terdapat delapan komponen kota hijau yaitu *green planning and design, green community, green open space, green building, green energy, green transportation, green water, dan green waste.*

2.2.3 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Renstra Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Isu Perangkat Daerah
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Posisi strategis yang memicu pertumbuhan ekonomi dan investasi sekaligus meningkatnya urbanisasi dan kebutuhan hunian semakin meningkat	Masih rendahnya ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan perijinan bangunan gedung	Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: *Meningkatnya emisi karbon dengan kontribusi terbesar dari bangunan gedung*	Transisi Energi, perubahan iklim, dan Infrastruktur Berkelanjutan		Memperkuat Iklim Investasi dan Pemerataan Pembangunan	Optimalisasi Pelayanan Publik Terkait Perijinan Bangunan Gedung
Potensi Lingkungan & Pariwisata	Belum tertatanya bangunan dan lingkungannya	Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan	• Urbanisasi • Perubahan iklim	Krisis Lingkungan	Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas	Optimalisasi pengendalian bangunan
Meningkatnya investasi menyebabkan meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi	Masih terdapat penyelenggaraan jasa konstruksi yang belum memenuhi standart					Kualitas Dan Kompetensi SDM Jasa Konstruksi
Kewajiban peningkatan keandalan Bangunan Gedung Negara	Belum optimalnya kesesuaian pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang				Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan: peningkatan keandalan bangunan gedung negara
Lokasi Kota Semarang yang berada di tengah tengah Pulau Jawa dan menjadi hub bagi daerah lain.	Belum optimalnya kesesuaian pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang				Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota	(1)Penyusunan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang (RTR): Penyusunan RTR yang berkualitas dan relevan dengan

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						kebutuhan pembangunan daerah serta melakukan evaluasi secara berkala (2)Pengendalian pemanfaatan ruang: Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta mendorong implementasi RTR yang efektif. (3)Penataan Ruang yang berkelanjutan: Pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penataan ruang untuk menjaga keseimbangan ekologi dan sosial. (4) Penguatan data geospasial
Urusan pertanahan menjadi kewenangan daerah	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan urusan pertanahan	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan	• Transformasi Digital dan Inovasi	Tata Kelola dan Akuntabilitas	• Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Pengendalian dan penanganan sengketa: Penyelesaian

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		yang baik, demokratis, bertanggung jawab	• Perkembangan Teknologi	Pemerintah	• Penyelenggaraan Good Governance	sengketa pertanahan secara cepat, tepat, dan adil melalui mediasi, ajudikasi, atau litigasi.
	Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum					Peningkatan kualitas fasilitasi pelayanan pertanahan termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi
	Belum optimalnya penatagunaan tanah					Digitalisasi Data Pertanahan
• Peningkatan nilai SAKIP Kota Semarang • Tingkat Maturitas SPIP di Kota Semarang terus meningkat • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	• Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Dinas Penataan Ruang • Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan					Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Penataan Ruang
Semarang masuk dalam program Smart City Nasional		Kebijakan tata ruang berbasis penurunan emisi karbon	Digitalisasi & big data			Sistem informasi geospasial dalam tata ruang

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

BAB III
TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Visi Kota Semarang 2025-2029:

KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI, DAN INKLUSIF

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dengan kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pokok visi **Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif**, Misi ke 5: Mewujudkan Infrastruktur Kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan Konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, terutama pada rumusan tujuan RPJMD 2025-2029 yaitu ***Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat dengan indikator Angka pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis (T2).***

Tujuan RPJMD 2025-2029 tersebut merupakan penjabaran dari Misi 5 yaitu: Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Semarang 2025-2029 tersebut, maka sasaran pembangunan Kota Semarang 2025-2029 yang harus diwujudkan oleh Dinas Penataan Ruang yaitu ***Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis dengan indikator Tingkat pengembangan kawasan strategis (S5).***

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dengan kewenangan urusan pertanahan juga mendukung pokok visi Pusat ekonomi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, humanis, dan inklusif**,** terutama pada rumusan tujuan RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat (T7), yang mendukung sasaran Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil (S17).

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD

sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kota Semarang 2025-2029, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 2025-2029.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG BERDAYAGUNA DAN BERKELANJUTAN"

Dengan indikator Persentase penatagunaruang yang berdayaguna dan berkelanjutan yang diperoleh dari rumus perhitungan pembobotan nilai dari sasaran Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW, yaitu pembobotan dari persentase bangunan yang berijin 35%; Persentase implementasi rencana tata ruang 30%; dan Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW 35%.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi adalah:

A. MENINGKATNYA KESESUAIAN DAN IMPLEMENTASI RTRW

Dengan indikator sasaran:

1) Persentase bangunan yang berijin yang dihitung melalui rumus Jumlah bangunan ber-PBG/Jumlah bangunan se-Kota Semarang (SP bangunan tanpa PBG).
2) Persentase implementasi rencana tata ruang yang dihitung melalui rumus Jumlah dokumen RTBL dan jumlah pelaksanaan pembangunan strategis.
3) Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW yang dihitung melalui rumus jumlah SK KRK dibagi dengan permohonan KRK.

B. MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG

Dengan indikator sasaran:

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penataan Ruang
   Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (diambil dari angka yang dikeluarkan oleh Inspektorat).
2) Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penataan Ruang

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (diambil dari AsikMas milik Bag. Organisasi).

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 5: Mewujudkan Infrastruktur Kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan Konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan											
Tingkat pengembangan kawasan strategis (T2)											
Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis (S5)	Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan		Persentase penatagunaruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	%	59,78	65,4	72,71	79,99	86,35	87,31	Pembobotan dari Persentase bangunan yang berijin 35%; Persentase implementasi rencana tata ruang 30%; Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW 35%
		Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW	1. Persentase bangunan yang berijin	%	78	79	80	81	82	83	Jumlah bangunan ber-PBG/Jumlah bangunan se-Kota Semarang (SP bangunan tanpa PBG)
			2. Persentase Implementasi Rencana Tata Ruang	%	22,22	38,89	58,33	80,56	100	100	Jumlah dokumen RTBL dan jumlah pelaksanaan pembangunan strategis
			3. Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	73,75	74,5	77,75	78,5	79	80,75	Jumlah SKK RK dibagi dengan permohonan KRK
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penataan Ruang	%	80,05	80,1	80,15	80,2	80,25	80,30	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (diambil dari angka yang dikeluarkan oleh Inspektorat)
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penataan Ruang	%	96,73	97	97,5	97,8	98	98,5	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (diambil dari AsikMas milik Bag. Organisasi)

3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Tahapan Strategi
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	**TAHAP II 2027**	**TAHAP III 2028**	**TAHAP IV 2029**	**TAHAP V 2030**
Meningkatkan penataan bangunan gedung	Meningkatkan penataan bangunan gedung	Meningkatkan penataan bangunan gedung	Meningkatkan penataan bangunan gedung	Meningkatkan penataan bangunan gedung
Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis daerah	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis daerah	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis daerah	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis daerah	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis daerah
Meningkatkan penyelenggaran penataan ruang	Meningkatkan penyelenggaran penataan ruang	Meningkatkan penyelenggaran penataan ruang	Meningkatkan penyelenggaran penataan ruang	Meningkatkan penyelenggaran penataan ruang
Meningkatkan penyelenggaraan urusan pertanahan	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pertanahan	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pertanahan	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pertanahan	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pertanahan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatnya efektifitas tata kelola kelembagaan	Meningkatnya efektifitas tata kelola kelembagaan	Meningkatnya efektifitas tata kelola kelembagaan	Meningkatnya efektifitas tata kelola kelembagaan	Meningkatnya efektifitas tata kelola kelembagaan

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap.

Sebagai gambaran, Dinas Penataan Ruang melaksanakan prioritas Kepala Daerah Terpilih yaitu mendukung program prioritas Peningkatan Akses Jalan dan Konektivitas ke Wilayah Pengembangan melalui Pembangunan landscape dan landmark kota, terutama di batas kota.

Dinas Penataan Ruang mendukung road map penanganan Sumber Daya Air melalui Implementasi *Delta Q Zero Policy* kepada para pengembang perumahan. Rekomendasi Teknis Hidrologi dari DPU menjadi syarat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat memperkuat pengawasan pada pengembang agar melakukan Integrasi salura drainase kawasan permukiman dengan drainase kota menjadi tanggung jawab pengembang. Kebijakan ini menjawab permasalahan perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan debit banjir.

Dinas Penataan Ruang juga mendukung road map Lingkungan Hidup, terutama strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelestarian kawasan lindung melalui:

1. Pengendalian KDH 30-40% pada kawasan perumahan
2. Implementasi Bangunan Gedung Hijau (BGH)/Infrastruktur Hijau pada Kawasan atau Bangunan Gedung Negera

Dinas Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian program prioritas Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memiliki arah kebijakan antara lain:

a) Penguatan kebijakan tata ruang melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun kebijakan lainnya sesuai perundang-undangan;
b) Pengendalian pemanfaatan tata ruang melalui KKPR/KRK/RIK;
c) Perencanaan, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung melalui rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, dan Bangunan Gedung Hijau sampai dengan penertiban bangunan tidak berijin;
d) Pemenuhan kebutuhan bangunan dan fasilitas publik strategis daerah baik berupa DED maupun bangunan fisik hingga pemeliharaan;
e) Peningkatan keandalan bangunan gedung negara (BGN);

f) Penetapan road map penurunan emisi karbon pada bangunan gedung;
g) Penetapan road map data dan informasi geospasial;
h) Mendukung pengembangan kawasan strategis sejarah dan budaya melalui penetapan bangunan cagar budaya (BCB);
i) Mendukung pengembangan kawasan strategis ekonomi melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
j) Pengendalian dan penertiban reklame;

Selain itu, dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Penataan Ruang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu:

a) Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan instansi pemerintah daerah.
b) Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya

Pada Urusan Pertanahan, dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Dinas Penataan Ruang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu: Mendorong legalisasi aset produktif milik rakyat dari perampasan, pencaplokan dan akuisisi dari pihak lain melalui penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi.

Berikut uraian arah kebijakan Dinas Penataan Ruang:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis mendukung MISI 5: *Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan*	Penyediaan infrastruktur yang inklusif bagi kelompok rentan dan difabel.	Meningkatkan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Penetapan Bangunan Cagar Budaya (Pengembangan kawasan strategis sejarah dan budaya)*
			Menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung	• *Penguatan kebijakan bangunan gedung* • *Penguatan road map penurunan emisi karbon pada bangunan gedung* • *Dukungan penerapan Delta Q Zero Policy*
			Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Penguatan wasdal bangunan gedung*

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Menyelenggarakan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Penerbitan rekomtek dan ijin bangunan gedung (PBG, SLF, BGH) dan peningkatan retribusi PBG*
			Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	*Penguatan wasdal reklame dan retribusi reklame*
			Memfasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	*Fasilitasi sertifikasi pelaku jasa konstruksi*
			Melatih Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
		• Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar secara merata • Peningkatan Akses Jalan dan Konektivitas ke Wilayah Pengembangan	Melaksanakan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Rehabilitasi Gedung Negara yang merupakan bangunan strategis daerah dalam rangka pemenuhan BGN yang responsif gender*
			Melaksanakan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Pemeliharaan Gedung Negara yang merupakan bangunan strategis daerah (aset pemerintah Kota Semarang)*
			Melaksanakan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	• *Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang merupakan bangunan strategis daerah (Pembangunan landscape dan landmark kota, terutama di batas kota)*

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
				• *Mendukung arah kebijakan Peningkatan ruang terbuka hijau dan pelestarian kawasan lindung : Implementasi Bangunan Gedung Hijau (BGH)/ Infrastruktur Hijau pada Kawasan atau Bangunan Gedung Negera* • *Implementasi BGN ramah gender* • *Dukungan Kota Layak Anak*
			Memberikan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	• *Penyusunan DED BGN mengacu pada prinsip keandalan bangunan dan responsif gender* • *Mendukung arah kebijakan Peningkatan ruang terbuka hijau dan pelestarian kawasan lindung melalui Implementasi Bangunan Gedung Hijau (BGH)/ Infrastruktur Hijau pada Kawasan atau Bangunan Gedung Negera*
		Pengembangan Kawasan strategis ekonomi berdasarkan potensi wilayah	Menetapkan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	• *Penetapan RDTR* • *Pengawasan dan pengendalian tata ruang melalui KRK dan KKPR* • *Penyusunan masterplan kawasan strategis (RTBL)* • *Mendukung arah kebijakan Peningkatan ruang terbuka hijau dan pelestarian kawasan lindung melalui Pengendalian KDH 30-40% pada kawasan perumahan*
			Menyebarluaskan Informasi Penataan Ruang	• *Pengendalian KDH 30-40% pada kawasan perumahan* • *Dukungan data dan informasi geospasial*
			Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
			Mengkoordinasikan Pelaksanaan	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Penataan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	• *Pengembangan kawasan strategis ekonomi*
			Mengoperasionalisasikan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
		Pengembangan infrastruktur digital sebagai bagian kota cerdas.	Menyusun Peta Dasar dan Data Geospasial	*Dukungan Decision Support System (DSS) Geospasial*
2	MISI 7: Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas	• Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi. • Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan Teknologi dalam pengambilan keputusan. • Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan • Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan sistem merit. • Pengembangan kota cerdas untuk pengelolaan kota berbasis data.	Melaksanakan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Menginventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Melaksanakan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	
			Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
			Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan*
			Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKDPA-SKPD	
			Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
			Mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Menyelenggarakan Walidata pendukung statistik sektoral daerah	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Menyediakan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
			Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	
			Menyusun Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Mendata dan mengolah administrasi kepegawaian	
			Melaksanakan bimtek implementasi Peraturan perundang-undangan	
			Menyediakan bahan logistik kantor	
			Menyediakan Barang cetakan dan penggadaan	
			Memfasilitasi kunjungan tamu	
			Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	
			Mendukung pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	*Optimalisasi informasi geospasial (Decision Support System) dan mendukung smart city*
			Menyediakan Peralatan dan mesin lainnya	
			Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
			Menyediakan jasa pelayanan umum kantor	
			Menyediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	
			Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Teknik merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Penataan Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
NSPK : Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat **Sasaran RPJMD yang Relevan : Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis**	**Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan**				**Persentase Penatagunaruang Yang Berdayaguna dan Berkelanjutan**		**Kepala Dinas Penataan Ruang**
		Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW			**1. Persentase bangunan yang berijin**		**Kepala Dinas Penataan Ruang**
			Meningkatnya penyelenggaraan penataan dan perijinan bangunan gedung		**Rasio Kepatuhan PBG**	**1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Kepala Bidang Tata Bangunan**
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap legalitas bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung terhadap ijin yang dikeluarkan (SP pada bangunan ber PBG)	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Subkoor Perencanaan dan Penataan Bangunan
				Tersedianya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Staf Subkoor Perencanaan dan Penataan Bangunan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Staf Subkoor Perencanaan dan Penataan Bangunan
				Meningkatnya penetapan BCB	Persentase BCB yang ditetapkan	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Subkoor Pemanfaatan Bangunan
				Meningkatnya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi,	1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis	Staf Subkoor Pemanfaatan Bangunan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan dan Diselenggarakan	Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Staf Subkoor Pemanfaatan Bangunan
			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan		**Persentase reklame yang berizin**	**1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Kepala Bidang Tata Bangunan**
				Meningkatnya pengawasan dan pengendalian reklame	Persentase kepatuhan reklame yang berizin kepatuhan atas ijin reklame yang dikeluarkan dan kepatuhan membayar retribusi	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Bangunan
				MeningkatnyaPembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0012 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Staf Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Bangunan
			Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi		**Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Kepala Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelatihan tenaga terampil konstruksi	Persentase penyelenggaraan kegiatan pelatihan jasa konstruksi	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Subkoordinator Jasa Konstruksi
				Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Staf Subkoordinator Jasa Konstruksi
				Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Terlatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Staf Subkoordinator Jasa Konstruksi
					2. Persentase implementasi rencana tata ruang		**Kepala Bidang Tata Bangunan**
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN		**Persentase BGN dalam kondisi baik**	**1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Kepala Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi**
				Meningkatnya keandalan BGN	Persentase BGN yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang di ubahsuai	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Staf Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi
				Meningkatnya Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Staf Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi
				Meningkatnya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Staf Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi
				Terpenuhinya kebutuhan ded BGN	Persentase DED yang terpenuhi	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Desain

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Desain
					3. Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW		**Kepala Bidang Tata Bangunan**
			Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang		**Persentase penerbitan KRK**	**1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kepala Bidang Tata Ruang**
				Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Subkoor Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang
				Meningkatnya Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Staf Subkoor Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang
				Meningkatnya penyebarluaskan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Staf Subkoor Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang
				Meningkatnya Koordinasi dan	Persentase perencanaan tata	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi	Subkoor Pembinaan dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	ruang di Kota Semarang yang sesuai	Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Tata Ruang
				Meningkatnya Peta Dasar dan Informasi Geospasial	Jumlah data SHP Peta Dasar	1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	Staf Subkoor Pembinaan dan Kelembagaan Tata Ruang
				Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Staf Subkoor Pembinaan dan Kelembagaan Tata Ruang
				Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang yng terkoordinir dan sinkron (KRK terhadap PBG)	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
				Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi Pelaksanaan penataan ruang	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Staf Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
				Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan ruang	1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Staf Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
			Meningkatnya penyelesaian		**Persentase penyelesaian permasalahan tanah**	**2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN**	**Kepala Bidang Pertanahan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			sengketa tanah garapan		**di kota semarang yang terfasilitasi melalui mediasi**	**SENGKETA TANAH GARAPAN**	
				Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase permasalahan tanah di kota semarang yang terfasilitasi (termasuk GTRA)	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan
				Meningkatnya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Berita acara mediasi, Laporan kegiatan mediasi	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Staf Tim Kerja Fasilitasi Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan
				Meningkatnya Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokuman aduan/ laporan permasalahan pertanahan	2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Staf Tim Kerja Fasilitasi Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan
			Terlaksananya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah akibat pengadaan tanah untuk pembangunan		**Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan pemda**	**2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Kepala Bidang Pertanahan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemda mulai dari penyelesaian ganti kerugian sampai dengan penerbitan sertifikat	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pengadaan Tanah
				Meningkatnya Pelaksanakan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Staf Tim Kerja Fasilitasi Pengadaan Tanah
			Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah		**persentase pemanfaatan aset tanah BMD**	**2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Kepala Bidang Pertanahan**
				Terlaksananya kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan administrasi tanah pemda yang terinventarisasi	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Pembinaan, Pendataan, dan Penataan Pertanahan
				Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Staf Tim Kerja Pembinaan, Pendataan, dan Penataan Pertanahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang			**1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penataan Ruang**		**Kepala Bidang Tata Bangunan**
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang		**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penataan Ruang yang berkualitas**	**1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sekretaris**
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen RKA-Dinas Penataan Ruang dan Laporan	1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Dinas Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Dinas Penataan Ruang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Dinas Penataan Ruang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Dinas Penataan Ruang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Statistik Sektoral Daerah	Statistik Sektoral Daerah	Statistik Sektoral Daerah	
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Subbag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Subbag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Subbag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Penataan Ruang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Subbag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Dinas Penataan Ruang dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Subbag Keuangan dan BMD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Semesteran Dinas Penataan Ruang		
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Subbag Keuangan dan BMD
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penataan Ruang		**Kepala Bidang Tata Bangunan**
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penataan Ruang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Penataan Ruang	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penataan Ruang	persentase aduan masyarakat kepada Dinas Penataan Ruang yang selesai ditindaklanjuti	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Penataan Ruang sesuai ketentuan	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Selanjutnya terkait program prioritas, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah, dimana bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Visi : Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
	Pokok Visi : Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif			
	Tujuan : Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat			
	Sasaran : Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis *Indikator : Tingkat pengembangan kawasan strategis*			
1	Pembangunan landscape dan landmark kota, terutama di batas kota	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kepala Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Visi : Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
2	Pengembangan kawasan strategis sejarah dan budaya	*(Indikator: Persentase BGN dalam kondisi baik)*	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1. Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi 2. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Desain
3	Pengembangan kawasan strategis ekonomi		1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi
			1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi
			1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Desain
			1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi
	Pokok Visi : Pusat ekonomi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, humanis, dan inklusif			
	Tujuan RPJMD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat			
	Sasaran RPJMD : Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil *Indikator : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*			
4	Mendorong legalisasi aset produktif milik rakyat dari perampasan, pencaplokan dan akuisisi dari pihak lain.	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan tertib pertanahan *(Indikator : Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi)*	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kepala Bidang Pertanahan
			2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan
			2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus	
	Sasaran RPJMD : Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil *Indikator : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Visi : Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
5	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah *(Indikator : Persentase laporan kinerja yang berkualitas)*	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris
6	Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya		1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
			1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang terdapat pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Penataan Ruang

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG				**331.758.366.311,00**		**367.584.346.238,00**		**383.177.480.287,00**		**386.041.717.437,00**		**392.797.859.711,00**	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**151.863.267.925,00**		**168.128.155.355,00**		**175.207.391.443,00**		**176.507.746.518,00**		**179.575.014.846,00**	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				**2.439.488.698,00**		**2.697.575.929,00**		**2.809.907.507,00**		**2.830.541.221,00**		**2.879.211.879,00**	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan dan perijinan bangunan gedung	**Rasio kepatuhan PBG (%)**	**83,51**	**86**	**2.439.488.698,00**	**87**	**2.697.575.929,00**	**88**	**2.809.907.507,00**	**89**	**2.830.541.221,00**	**90**	**2.879.211.879,00**	**Kepala Bidang Tata Bangunan**
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				1.463.693.218,00		1.618.545.557,00		1.685.944.504,00		1.698.324.733,00		1.727.527.127,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap legalitas bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung terhadap ijin yang dikeluarkan (SP pada bangunan ber PBG)	84,26	86	1.463.693.218,00	87	1.618.545.557,00	88	1.685.944.504,00	89	1.698.324.733,00	90	1.727.527.127,00	Subkoor Perencanaan dan Penataan Bangunan
1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				243.948.870,00		269.757.593,00		280.990.751,00		283.054.122,00		287.921.188,00	
Tersedianya dokumen kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	5	2	243.948.870,00	2	269.757.593,00	2	280.990.751,00	2	283.054.122,00	2	287.921.188,00	Staf Subkoor Perencanaan dan Penataan Bangunan
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1.219.744.348,00		1.348.787.964,00		1.404.953.753,00		1.415.270.611,00		1.439.605.939,00	
Meningkatnya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	2.777	2.100	1.219.744.348,00	2.100	1.348.787.964,00	2.100	1.404.953.753,00	2.100	1.415.270.611,00	2.100	1.439.605.939,00	Staf Subkoor Perencanaan dan Penataan Bangunan
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,				975.795.480,00		1.079.030.372,00		1.123.963.003,00		1.132.216.488,00		1.151.684.752,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung													
Meningkatnya penetapan BCB	Persentase BCB yang ditetapkan (%)	100	100	975.795.480,00	100	1.079.030.372,00	100	1.123.963.003,00	100	1.132.216.488,00	100	1.151.684.752,00	Subkoor Pemanfaatan Bangunan
1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				243.948.870,00		269.757.593,00		280.990.751,00		283.054.122,00		287.921.188,00	
Meningkatnya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan (Bangunan)	58	2	243.948.870,00	2	269.757.593,00	2	280.990.751,00	2	283.054.122,00	2	287.921.188,00	Staf Subkoor Pemanfaat Dan Bangunan
1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				731.846.610,00		809.272.779,00		842.972.252,00		849.162.366,00		863.763.564,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2.595	500	731.846.610,00	500	809.272.779,00	500	842.972.252,00	500	849.162.366,00	500	863.763.564,00	Staf Subkoor Pemanfaat Dan Bangunan
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				**119.534.946.222,00**		**132.181.220.569,00**		**137.685.467.807,00**		**138.696.519.812,00**		**141.081.382.108,00**	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN	**Persentase BGN dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**119.534.946.222,00**	**100**	**132.181.220.569,00**	**100**	**137.685.467.807,00**	**100**	**138.696.519.812,00**	**100**	**141.081.382.108,00**	**Kepala Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi**
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan				117.741.922.029,00		130.198.502.260,00		135.620.185.790,00		136.616.072.015,00		138.965.161.376,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung													
Meningkatnya keandalan BGN	Persentase BGN yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	100	117.741.922.029,00	100	130.198.502.260,00	100	135.620.185.790,00	100	136.616.072.015,00	100	138.965.161.376,00	Subkoor Pembangunan dan rehabilitasi
1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				59.767.473.111,00		66.090.610.284,00		68.842.733.904,00		69.348.259.906,00		70.540.691.054,00	
Terlaksananya ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	31	4	59.767.473.111,00	4	66.090.610.284,00	4	68.842.733.904,00	4	69.348.259.906,00	4	70.540.691.054,00	Staf Subkoor Pembangunan dan rehabilitasi
1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4.183.723.118,00		4.626.342.720,00		4.818.991.373,00		4.854.378.193,00		4.937.848.374,00	
Terpelihara, terawat, dan terperiksanya bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	20	5	4.183.723.118,00	5	4.626.342.720,00	5	4.818.991.373,00	5	4.854.378.193,00	5	4.937.848.374,00	Staf Subkoor Pembangunan dan rehabilitasi
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				53.790.725.800,00		59.481.549.256,00		61.958.460.513,00		62.413.433.916,00		63.486.621.948,00	
Tersedianya dokumen pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	47	3	53.790.725.800,00	3	59.481.549.256,00	3	61.958.460.513,00	3	62.413.433.916,00	3	63.486.621.948,00	Staf Subkoor Pembangunan dan rehabilitasi

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				1.793.024.193,00		1.982.718.309,00		2.065.282.017,00		2.080.447.797,00		2.116.220.732,00	
Terpenuhinya kebutuhan DED BGN	Persentase DED yang terpenuhi	-	100	1.793.024.193,00	100	1.982.718.309,00	100	2.065.282.017,00	100	2.080.447.797,00	100	2.116.220.732,00	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Desain
1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				1.793.024.193,00		1.982.718.309,00		2.065.282.017,00		2.080.447.797,00		2.116.220.732,00	
Terlaksananya bantuan teknis pembangunan gedung Negara untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	5	5	1.793.024.193,00	5	1.982.718.309,00	5	2.065.282.017,00	5	2.080.447.797,00	5	2.116.220.732,00	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Desain
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				**619.134.178,00**		**684.635.866,00**		**713.145.249,00**		**718.382.017,00**		**730.734.470,00**	
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan	**Persentase reklame yang berizin**	**84,7**	**85,5**	**619.134.178,00**	**86**	**684.635.866,00**	**86,5**	**713.145.249,00**	**87**	**718.382.017,00**	**87,5**	**730.734.470,00**	**Kepala Bidang Tata Bangunan**
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				619.134.178,00		684.635.866,00		713.145.249,00		718.382.017,00		730.734.470,00	
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian reklame	Persentase kepatuhan reklame yang berijin	99,46	99,5	619.134.178,00	99,5	684.635.866,00	99,5	713.145.249,00	99,5	718.382.017,00	99,5	730.734.470,00	Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Bangunan
1.03.09.2.01.0012 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				619.134.178,00		684.635.866,00		713.145.249,00		718.382.017,00		730.734.470,00	
MeningkatnyaPembinaan dan pengawasan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan	418	300	619.134.178,00	200	684.635.866,00	100	713.145.249,00	50	718.382.017,00	50	730.734.470,00	Staf Tim Kerja Pembinaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
penataan dan lingkungan	dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan												dan Pengawasan Bangunan
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				**539.493.759,00**		**596.569.839,00**		**621.412.005,00**		**625.975.158,00**		**636.738.691,00**	
Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi	**Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**53,94**	**56**	**539.493.759,00**	**57**	**596.569.839,00**	**58**	**621.412.005,00**	**59**	**625.975.158,00**	**60**	**636.738.691,00**	**Kepala Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi**
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				539.493.759,00		596.569.839,00		621.412.005,00		625.975.158,00		636.738.691,00	
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pelatihan jasa konstruksi	90	100	539.493.759,00	100	596.569.839,00	100	621.412.005,00	100	625.975.158,00	100	636.738.691,00	Subkoor Jasa Konstruksi
1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				269.746.879,50		298.284.919,50		310.706.002,50		312.987.579,00		318.369.345,50	
Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	540	100	269.746.879,50	100	298.284.919,50	100	310.706.002,50	100	312.987.579,00	100	318.369.345,50	Staf Subkoor Jasa Konstruksi
1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				269.746.879,50		298.284.919,50		310.706.002,50		312.987.579,00		318.369.345,50	
Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Terlatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	420	100	269.746.879,50	100	298.284.919,50	100	310.706.002,50	100	312.987.579,00	100	318.369.345,50	Staf Subkoor Jasa Konstruksi
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				**2.421.482.302,00**		**2.677.664.535,00**		**2.789.166.968,00**		**2.809.648.380,00**		**2.857.959.791,00**	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang.	**Persentase penerbitan KRK**	**89,85**	**92**	**2.421.482.302,00**	**94**	**2.677.664.535,00**	**96**	**2.789.166.968,00**	**98**	**2.809.648.380,00**	**100**	**2.857.959.791,00**	**Kepala Bidang Tata Ruang**
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan				968.592.920,80		1.071.065.814,00		1.115.666.787,20		1.123.859.352,00		1.143.183.916,40	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota													
Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan	100	100	968.592.920,80	100	1.071.065.814,00	100	1.115.666.787,20	100	1.123.859.352,00	100	1.143.183.916,40	Subkoor Perencanaan dan Pemanfaatan tata ruang
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				678.015.044,56		749.746.069,80		780.966.751,04		786.701.546,40		800.228.741,48	
Meningkatnya Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5	1	678.015.044,56	1	749.746.069,80	1	780.966.751,04	1	786.701.546,40	1	800.228.741,48	Staf Subkoor Perencanaan dan Pemanfaatan tata ruang
1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				290.577.876,24		321.319.744,20		334.700.036,16		337.157.805,60		342.955.174,92	
Meningkatnya penyebarluaskan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1	1	290.577.876,24		321.319.744,20	1	334.700.036,16	1	337.157.805,60	1	342.955.174,92	Staf Subkoor Perencanaan dan Pemanfaatan tata ruang
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				726.444.690,60		803.299.360,50		836.750.090,40		842.894.514,00		857.387.937,30	
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan tata ruang di Kota Semarang yang sesuai	100	100	726.444.690,60	100	803.299.360,50	100	836.750.090,40	100	842.894.514,00	100	857.387.937,30	Subkoor Pembinaan dan Kelembagaan Tata Ruang
1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar				217.933.407,18		240.989.808,15		251.025.027,12		252.868.354,20		257.216.381,19	
Meningkatnya Peta Dasar dan Informasi Geospasial	Jumlah data SHP Peta Dasar	-	2	217.933.407,18	2	240.989.808,15	2	251.025.027,12	2	252.868.354,20	2	257.216.381,19	Staf Subkoor Pembinaan dan Kelembagaan Tata Ruang
1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran				508.511.283,42		562.309.552,35		585.725.063,28		590.026.159,80		600.171.556,11	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Masyarakat dalam Penataan Ruang													
Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	2	1	508.511.283,42	1	562.309.552,35	1	585.725.063,28	1	590.026.159,80	1	600.171.556,11	Staf Subkoor Pembinaan dan Kelembagaan Tata Ruang
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				726.444.690,60		803.299.360,50		836.750.090,40		842.894.514,00		857.387.937,30	
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang yng terkoordinir dan sinkron (KRK terhadap PBG)	100	100	726.444.690,60	100	803.299.360,50	100	836.750.090,40	100	842.894.514,00	100	857.387.937,30	Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian tata ruang
1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				435.866.814,36		481.979.616,30		502.050.054,24		505.736.708,40		514.432.762,38	
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi Pelaksanaan penataan ruang	1	1	435.866.814,36	1	481.979.616,30	1	502.050.054,24		505.736.708,40	1	514.432.762,38	Staf Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian tata ruang
1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				290.577.876,24		321.319.744,20		334.700.036,16		337.157.805,60		342.955.174,92	
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan ruang	1	1	290.577.876,24		321.319.744,20	1	334.700.036,16	1	337.157.805,60	1	342.955.174,92	Staf Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian tata ruang
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**26.308.722.766,00**		**29.290.488.617,00**		**30.588.291.907,00**		**30.826.679.930,00**		**31.388.987.907,00**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas**	**100**	**100**	**26.308.722.766,00**	**100**	**29.290.488.617,00**	**100**	**30.588.291.907,00**	**100**	**30.826.679.930,00**	**100**	**31.388.987.907,00**	**Sekretaris**

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Penataan Ruang yang berkualitas												
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penataan Ruang	**86,96**	**87**		**87**		**88**		**88**		**88**		
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				197.315.420,00		219.678.664,00		229.412.187,00		231.200.100,00		235.417.407,00	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	100	100	197.315.420,00	100	219.678.664,00	100	229.412.187,00	100	231.200.100,00	100	235.417.407,00	Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.597.313,00		32.951.800,00		34.411.828,00		34.680.015,00		35.312.611,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Penataan Ruang	5	3	29.597.313,00	3	32.951.800,00	3	34.411.828,00	3	34.680.015,00	3	35.312.611,00	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9.865.771,00		10.983.933,00		11.470.609,00		11.560.005,00		11.770.870,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Dinas Penataan Ruang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Dinas Penataan Ruang	1	1	9.865.771,00	1	10.983.933,00	1	11.470.609,00	1	11.560.005,00	1	11.770.870,00	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9.865.771,00		10.983.933,00		11.470.609,00		11.560.005,00		11.770.870,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Dinas Penataan Ruang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Dinas Penataan Ruang	1	1	9.865.771,00	1	10.983.933,00	1	11.470.609,00	1	11.560.005,00	1	11.770.870,00	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.865.771,00		10.983.933,00		11.470.609,00		11.560.005,00		11.770.870,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	Jumlah Dokumen DPA-Dinas Penataan Ruang dan	1	1	9.865.771,00	1	10.983.933,00	1	11.470.609,00	1	11.560.005,00	1	11.770.870,00	Staf Subkoor

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Dinas Penataan Ruang												Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				9.865.771,00		10.983.933,00		11.470.609,00		11.560.005,00		11.770.870,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Dinas Penataan Ruang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Dinas Penataan Ruang	1	1	9.865.771,00	1	10.983.933,00	1	11.470.609,00	1	11.560.005,00	1	11.770.870,00	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.463.084,00		43.935.733,00		45.882.438,00		46.240.020,00		47.083.482,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Penataan Ruang	4	4	39.463.084,00	4	43.935.733,00	4	45.882.438,00	4	46.240.020,00	4	47.083.482,00	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				88.791.939,00		98.855.399,00		103.235.485,00		104.040.045,00		105.937.834,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	88.791.939,00	1	98.855.399,00	1	103.235.485,00	1	104.040.045,00	1	105.937.834,00	Staf Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.677.850.491,00		26.361.439.755,00		27.529.462.717,00		27.744.011.937,00		28.250.089.115,00	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	100	100	23.677.850.491,00	100	26.361.439.755,00	100	27.529.462.717,00	100	27.744.011.937,00	100	28.250.089.115,00	Kepala Subbag Keuangan dan BMD
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.215.936.268,00		24.302.212.921,00		25.442.058.206,00		26.638.143.101,00		27.893.272.061,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	183	23.215.936.268,00	183	24.302.212.921,00	183	25.442.058.206,00	183	26.638.143.101,00	183	27.893.272.061,00	Staf Subbag Keuangan dan BMD
1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				444.155.834,00		2.039.455.754,00		2.066.757.413,00		1.085.060.827,00		335.629.488,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	444.155.834,00	1	2.039.455.754,00	1	2.066.757.413,00	1	1.085.060.827,00	1	335.629.488,00	Staf Subbag Keuangan dan BMD
1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.919.463,00		6.590.360,00		6.882.366,00		6.936.003,00		7.062.522,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Penataan Ruang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Penataan Ruang	1	1	5.919.463,00	1	6.590.360,00	1	6.882.366,00	1	6.936.003,00	1	7.062.522,00	Staf Subbag Keuangan dan BMD
1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.919.463,00		6.590.360,00		6.882.366,00		6.936.003,00		7.062.522,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Dinas Penataan Ruang dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Penataan Ruang	12	12	5.919.463,00	12	6.590.360,00	12	6.882.366,00	12	6.936.003,00	12	7.062.522,00	Staf Subbag Keuangan dan BMD
1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.919.463,00		6.590.360,00		6.882.366,00		6.936.003,00		7.062.522,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	5.919.463,00	1	6.590.360,00	1	6.882.366,00	1	6.936.003,00	1	7.062.522,00	Staf Subbag Keuangan dan BMD
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				131.543.614,00		146.452.443,00		152.941.460,00		154.133.400,00		156.944.940,00	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penataan Ruang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Penataan Ruang		67,62	131.543.614,00	0	146.452.443,00	68,97	152.941.460,00	70,35	154.133.400,00	71,76	156.944.940,00	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Administrasi Kepegawaian													
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				126.543.614,00		141.452.443,00		147.941.460,00		149.133.400,00		151.944.940,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	200	126.543.614,00	200	141.452.443,00	200	147.941.460,00	200	149.133.400,00	200	151.944.940,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				657.718.069,00		732.262.216,00		764.707.299,00		770.666.999,00		784.724.699,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Penataan Ruang	95	96	657.718.069,00	97	732.262.216,00	98	764.707.299,00	99	770.666.999,00	100	784.724.699,00	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.771.807,00		73.226.222,00		76.470.730,00		77.066.700,00		78.472.470,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	65.771.807,00	4	73.226.222,00	4	76.470.730,00	4	77.066.700,00	4	78.472.470,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				32.885.903,00		36.613.111,00		38.235.365,00		38.533.350,00		39.236.235,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	32.885.903,00	4	36.613.111,00	4	38.235.365,00	4	38.533.350,00	4	39.236.235,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.771.807,00		73.226.222,00		76.470.730,00		77.066.700,00		78.472.470,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	65.771.807,00	2	73.226.222,00	2	76.470.730,00	2	77.066.700,00	2	78.472.470,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat				131.543.614,00		146.452.443,00		152.941.460,00		154.133.400,00		156.944.940,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Penataan Ruang	50	50	131.543.614,00	50	146.452.443,00	50	152.941.460,00	50	154.133.400,00	50	156.944.940,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				361.744.938,00		402.744.218,00		420.589.014,00		423.866.849,00		431.598.584,00	
1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penataan Ruang	1	1	361.744.938,00	1	402.744.218,00	1	420.589.014,00	1	423.866.849,00	1	431.598.584,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				131.543.614,00		146.452.443,00		152.941.460,00		154.133.400,00		156.944.940,00	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	100	100	131.543.614,00	100	146.452.443,00	100	152.941.460,00	100	154.133.400,00	100	156.944.940,00	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				131.543.614,00		146.452.443,00		152.941.460,00		154.133.400,00		156.944.940,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	131.543.614,00	2	146.452.443,00	2	152.941.460,00	2	154.133.400,00	2	156.944.940,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				591.946.262,00		659.035.993,00		688.236.568,00		693.600.299,00		706.252.228,00	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penataan Ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Penataan Ruang yang selesai ditindaklanjuti	100	100	591.946.262,00	100	659.035.993,00	100	688.236.568,00	100	693.600.299,00	100	706.252.228,00	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59.194.626,00		65.903.599,00		68.823.657,00		69.360.030,00		70.625.223,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	59.194.626,00	12	65.903.599,00	12	68.823.657,00	12	69.360.030,00	12	70.625.223,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				532.751.636,00		593.132.394,00		619.412.911,00		624.240.269,00		635.627.005,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1	532.751.636,00	1	593.132.394,00	1	619.412.911,00	1	624.240.269,00	1	635.627.005,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				920.805.296,00		1.025.167.103,00		1.070.590.216,00		1.078.933.795,00		1.098.614.578,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Penataan Ruang sesuai ketentuan	100	100	920.805.296,00	100	1.025.167.103,00	100	1.070.590.216,00	100	1.078.933.795,00	100	1.098.614.578,00	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				230.201.324,00		256.291.775,00		267.647.554,00		269.733.449,00		274.653.644,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	6	230.201.324,00	6	256.291.775,00	6	267.647.554,00	6	269.733.449,00	6	274.653.644,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				460.402.648,00		512.583.551,00		535.295.108,00		539.466.899,00		549.307.288,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54	48	460.402.648,00	48	512.583.551,00	48	535.295.108,00	48	539.466.899,00	48	549.307.288,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				138.120.795,00		153.775.065,00		160.588.533,00		161.840.070,00		164.792.187,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	524	524	138.120.795,00	524	153.775.065,00	524	160.588.533,00	524	161.840.070,00	524	164.792.187,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				92.080.529,00		102.516.712,00		107.059.021,00		107.893.377,00		109.861.459,00	
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	92.080.529,00	1	102.516.712,00	1	107.059.021,00	1	107.893.377,00	1	109.861.459,00	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**179.895.098.386,00**		**199.456.190.883,00**		**207.970.088.844,00**		**209.533.970.919,00**		**213.222.844.865,00**	
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN													
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	**Persentase penyelesaian permasalahan tanah di kota semarang yang terfasilitasi melalui mediasi**	**94,03**	**96**	**328.707.343,00**	**97**	**363.483.141,00**	**98**	**378.619.188,00**	**98**	**381.399.464,00**	**98**	**387.957.561,00**	**Kepala Bidang Pertanahan**
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				328.707.343,00		363.483.141,00		378.619.188,00		381.399.464,00		387.957.561,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase permasalahan tanah di kota semarang yang terfasilitasi (termasuk GTRA)	100	100	328.707.343,00	100	363.483.141,00	100	378.619.188,00	100	381.399.464,00	100	387.957.561,00	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan
2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				230.095.140,10		254.438.198,70		265.033.431,60		266.979.624,80		271.570.292,70	
Meningkatnya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63	24	230.095.140,10	24	254.438.198,70	24	265.033.431,60	24	266.979.624,80	24	271.570.292,70	Staf Tim Kerja Fasilitasi Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan
2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1				98.612.202,90		109.044.942,30		113.585.756,40		114.419.839,20		116.387.268,30	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67	30	98.612.202,90	30	109.044.942,30	30	113.585.756,40	30	114.419.839,20	30	116.387.268,30	Staf Tim Kerja Fasilitasi Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				**179.549.349.079,00**		**199.073.862.812,00**		**207.571.839.992,00**		**209.132.797.647,00**		**212.814.773.488,00**	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah	**Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah**	**25**	**50**	**179.549.349.079,00**	**50**	**199.073.862.812,00**	**50**	**207.571.839.992,00**	**50**	**209.132.797.647,00**	**50**	**212.814.773.488,00**	**Kepala Bidang Pertanahan**
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				179.549.349.079,00		199.073.862.812,00		207.571.839.992,00		209.132.797.647,00		212.814.773.488,00	
Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemda mulai dari penyelesaian ganti kerugian sampai dengan penerbitan sertifikat	0	1	179.549.349.079,00	1	199.073.862.812,00	1	207.571.839.992,00	1	209.132.797.647,00	1	212.814.773.488,00	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pengadaan Tanah
2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				179.549.349.079,00		199.073.862.812,00		207.571.839.992,00		209.132.797.647,00		212.814.773.488,00	
Meningkatnya Pelaksanakan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	179.549.349.079,00	1	199.073.862.812,00	1	207.571.839.992,00	1	209.132.797.647,00	1	212.814.773.488,00	Staf Tim Kerja Fasilitasi Pengadaan Tanah
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				**17.041.964,00**		**18.844.930,00**		**19.629.664,00**		**19.773.808,00**		**20.113.816,00**	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Rencana										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah	**persentase pemanfaatan aset tanah BMD**	**50**	**60**	**17.041.964,00**	**70**	**18.844.930,00**	**70**	**19.629.664,00**	**70**	**19.773.808,00**	**75**	**20.113.816,00**	**Kepala Bidang Pertanahan**
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				17.041.964,00		18.844.930,00		19.629.664,00		19.773.808,00		20.113.816,00	
Terlaksananya kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan administrasi tanah pemda yang terinventarisasi	0	100	17.041.964,00	100	18.844.930,00	100	19.629.664,00	100	19.773.808,00	100	20.113.816,00	Ketua Tim Kerja Pembinaan, Pendataan, dan Penataan Pertanahan
2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				17.041.964,00		18.844.930,00		19.629.664,00		19.773.808,00		20.113.816,00	
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	1	17.041.964,00	1	18.844.930,00	1	19.629.664,00	1	19.773.808,00	1	20.113.816,00	Staf Tim Kerja Pembinaan, Pendataan, dan Penataan Pertanahan

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang 2025-2026

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan: Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan								
1	Persentase penatagunaruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	%	59,78	65,4	72,71	79,99	86,26	87,14	Pembobotan persentase bangunan yang berijin 35%; Persentase implementasi rencana tata ruang 30%, Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW 35%"
	Sasaran : Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW								
1	Persentase Bangunan berijin	%	76,96	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	Jumlah bangunan ber-PBG/Jumlah bangunan se-Kota Semarang (SP bangunan tanpa PBG)
2	Persentase implemenasi rencana tata ruang	%	22,22	38,89	58,33	80,56	100,00	100,00	Jumlah dokumen RTBL dan jumlah pelaksanaan pembangunan strategis
3	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	73,75	74,50	77,75	78,50	79,00	80,75	jumlah SK KRK dibagi dengan permohonan KRK

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Selanjutnya terdapat beberapa Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Utama Pembangunan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	85	86	87	88	89	90	Jumlah SK PBG dibagi Jumlah Rekomtek PBG dikalikan 100%
2	Kesesuaian tata ruang	%	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah realisasi pengadaan lahan dibagi Jumlah rencana pengadaan lahan dikalikan 100%
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

6. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam khususnya bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
22. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
23. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 416/477 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Semarang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman. yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;

3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Selain itu, juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan
Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup
Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman, yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Berikut uraian tugas jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pertamanan, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, dan UPTD. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

a) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi Bidang Pertamanan, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, dan UPTD;
d) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e) penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
f) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan di Bidang Pertamanan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pertamanan melaksanakan fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Pertamanan;
b) pelaksanaan koordinasi di Bidang Pertamanan;
c) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertamanan;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pertamanan;
e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melaksanakan fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
b) pelaksanaan koordinasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
c) pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Permukiman. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Permukiman melaksanakan fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang Permukiman;
b) pelaksanaan koordinasi di bidang Permukiman;
c) pelaksanaan kebijakan di bidang Permukiman;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Permukiman;
e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman

Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman melaksanakan fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman;
b) pelaksanaan koordinasi di Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman;
c) pelaksanaan kebijakan di Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman; dan

e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mempunyai fungsi:

a) perumusan kebijakan Bidang Pertamanan, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
b) pelaksanaan koordinasi Bidang Pertamanan, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, dan UPTD;
c) pelaksanaan kebijakan Bidang Pertamanan, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, dan UPTD;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pertamanan, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, dan UPTD;
e) pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Pertamanan, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, dan UPTD;
f) pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

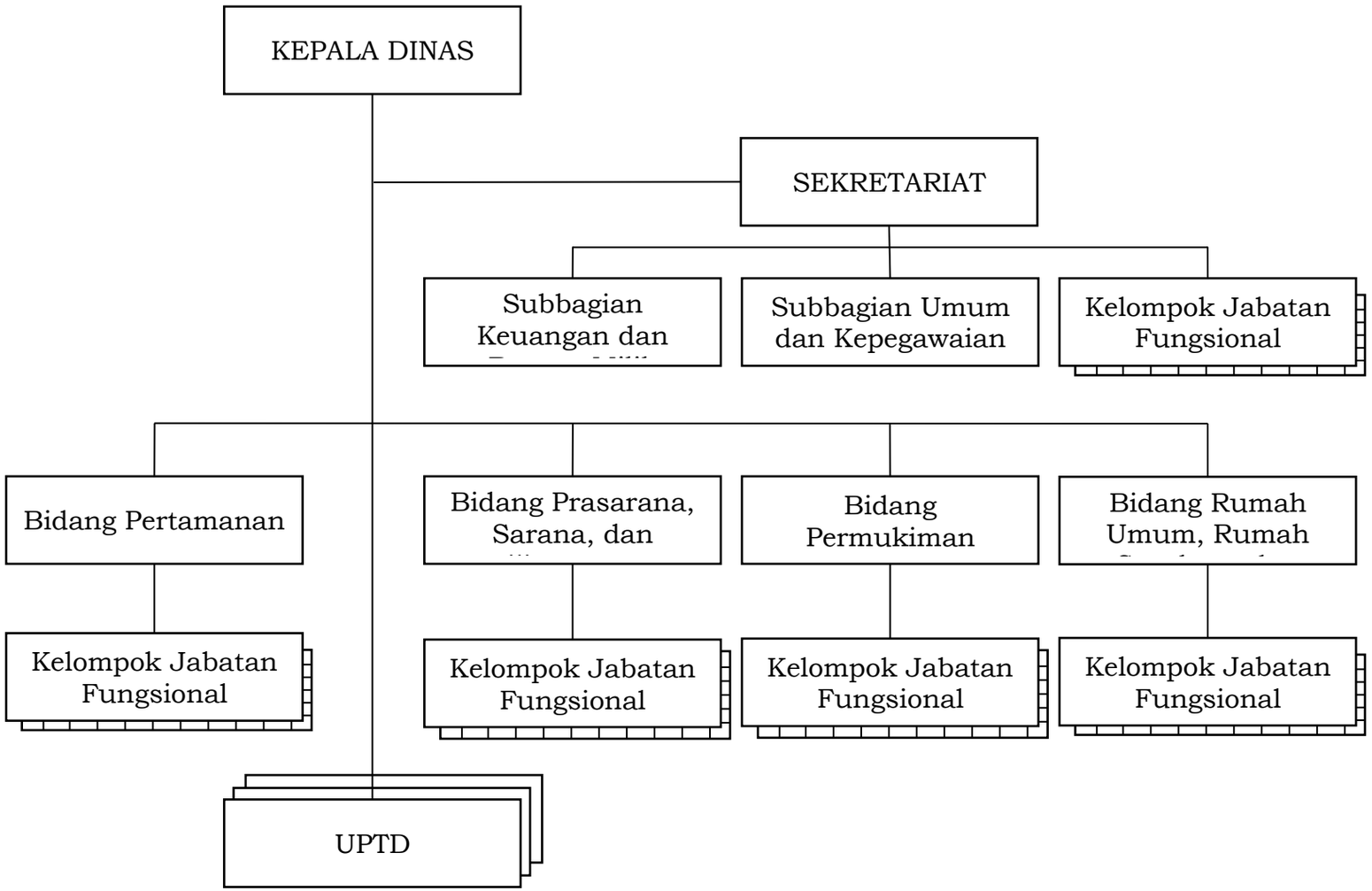

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dikepalai oleh Kepala Dinas yang membawahi sekretaris dan empat kepala bidang, yaitu Kepala Bidang Pertamanan, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Kepala Bidang Permukiman, serta Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman. Kepala Dinas juga membawahi empat Kepala UPTD, yaitu Kepala UPTD PJU (Penerangan Jalan Umum) I, Kepala UPTD PJU II, Kepala UPTD Pengolahan Air Limbah (PAL), dan Kepala UPTD Rumah Susun Sewa. Sekretaris membawahi Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang diklasifikasikan ke dalam jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Alih Daya		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	4	-	2	-	5	-	11
2	SMP Sederajat	7	-	-	-	6	-	13
3	SMA Sederajat	28	8	31	6	45	3	121
4	D3	29	9	8	4	4	-	54
5	S1	26	11	43	39	12	2	133
6	S2	5	4	-	-	-	2	11
7	S3	-	-	-	-	-	-	0

Dari jumlah pegawai sebanyak 343 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	2	-	2
2	Golongan II	54	12	66
3	Golongan III	43	18	61
4	Golongan IV	3	2	5
5	Golongan V	32	7	39
6	Golongan VII	7	2	9
7	Golongan IX	43	40	83

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Gudang	1.247,00	2013	Kelurahan Cangkiran Kec. Mijen	Hak Pakai	16/06/1901			Hibah	99.760.000,00	Psu Perumahan Puri Delta Asri 3
2	Tanah Bangunan Industri Lainnya (Dst)	1.143,00	2001	Jl. Siliwangi Semarang	Hak Pakai	17/11/2005	Hp7	Taman	Pembelian	2.286.000.000,00	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	166,00	1989 & 2009	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	544.500.000,00	
4	Tanah Bangunan Perdagangan Lainnya (Dst)	4.342,00	2015	Jl.Komplek Rusunawa Kudu	Hak Pakai				Pembelian	1.405.127.950,00	
5	Tanah Bangunan Rumah Lp	7.200,00	2014	Kel. Kudu	Hak Pakai				Pembelian	815.906.200,00	
6	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Dst)	2.458,00	2007 & 2019	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	5.979.234.082,00	
7	Tanah Kampung	18.134,00	1993 - 2011	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	14.276.166.190,00	
8	Tanah Kampung Lainnya (Dst)	9.012,00	2011 & 2013	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	3.592.558.000,00	
9	Tanah Kaveling (Dst)	32.892,50	2013	Kota Semarang	Hak Pakai				Hibah	15.366.320.000,00	
10	Tanah Kaveling (Dst)	18.889,00	2009 & 2023	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	34.237.902.000,00	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
11	Tanah Kebun Entres	33.179,00	1971 & 1984	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	790.806.200,00	
12	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	249,00	2013	Kelurahan Podorejokec. Ngaliyan	Hak Pakai	16/06/1901			Hibah	74.700.000,00	Psu Perumahan Bumi Palir Sejahtera
13	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	413.116,91	1971 - 2011	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	49.446.431.240,00	
14	Tanah Lapangan Bola Volly	1.744,00	1979	Jl. Taman Sudirman Kel. Gajahmungkur Kec Gajahmungkur	Hak Pakai	23/04/2007	97	Lapangan Volly	Pembelian	1.398.688.000,00	Taman Sudirman
15	Tanah Lapangan Lainnya	7.646,00	1979	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	46.285.784.000,00	
16	Tanah Lapangan Taman Lainnya	767,00	2019	Jalan Piere Tandean No.4 Kel.Sekayu, Kec. Semarang Tengah		11/05/1994	00032	Ruang Terbuka Hijau	Hibah	32.595.103.000,00	
17	Tanah Lapangan Taman Lainnya	19.348,00	2001 - 2022	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	29.396.100.000,00	
18	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	2.519,00	2014	Kel.Meteseh, Kec. Tembalang Kec Tembalang	Hak Pakai				Hibah	377.900.000,00	Penilaian 2014
19	Tanah Tandus Pengambilan/Kuari	403,20	2013	Kel. Cangkiran,Kec. Mijen	Hak Pakai	16/06/1901			Hibah	241.800.000,00	Psu Perumahan Puri Delta Asri 3

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
20	Tanah Tegalan	4.654,00	2008	Kota Semarang	Hak Pakai				Pembelian	1.500.000.000,00	
21	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	1.033,00	2023	Kota Semarang	Hak Pakai			Saluran	Hibah	685.654.000,00	Hibah Perumahan Pandanaran Hills Tahap 1 Bast No 131/Pkj.Bsjm/ Xii/2023_050/4 91/2023
22	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Lainnya	16.616,54	2020	Kota Semarang				Jaringan Jalan	Hibah	20.243.688.730,00	
23	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Limbah	133.064,00	2004	Jl. Inspeksi Banjirkanal Timur Genuk	Hak Pakai			Tanah Untuk Iplt	Pembelian	1.783.100.000,00	Hasil Penilaian Tahun 2009
24	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Lainnya (Dst)	406.534,40	2020 - 2021	Kota Semarang				Jaringan Saluran	Hibah	862.501.309.507,00	
25	Tanah Untuk Jalan Desa	306.651,75	2018	Kota Semarang				Jaling_33.74.1 0.1011.101	Pembelian	111.776.712.370,40	
26	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	108.425,80	2023 - 2024	Kota Semarang				Jalan	Hibah	427.419.182.000,00	
27	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	1.180.000,64	2004 - 2023	Kota Semarang	Hak Pakai			Jalan	Pembelian	176.208.975.515,40	
28	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4.273.290,03	1901 - 2024	Kota Semarang					Hibah	3.105.418.158.605,38	
29	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5.701.987,95	1979 - 2021	Kota Semarang					Pembelian	742.642.817.917,10	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
30	Tanah Untuk Jalan Lainnya	19.624,45	1899 - 2020	Kota Semarang	Hak Pakai				Hibah	17.806.739.900,80	
31	Tanah Untuk Jalan Nasional	59.082,00	2012	Perumahan Bukit Kencana Jaya Kecamatan Tembalang	Hak Pakai				Hibah	67.767.054.000,00	Fasum Fasos Pt. Bukit Semarang Jaya Metro
32	Tanah Untuk Makam Kristen	18,00	1983	Jl. Kedung Mundu	Hak Pakai	16/06/1901			Pembelian	500.000,00	Belum Bersertifikat
33	Tanah Untuk Makam Umum	121.434,00	2013 - 2020	Kota Semarang				Sarana Makam	Hibah	30.518.844.101,00	
34	Tanah Untuk Makam Umum	1.055.735,75	1977 - 2022	Kota Semarang					Pembelian	23.773.401.658,00	
35	Tanah Usaha	6.907,00	2012	Jl. Karangroto	Hak Pakai	07/06/2007	Hm 7 S.D Hm 14		Pembelian	1.613.263.300,00	Baik

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (m²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Asrama Permanen	Baik	2.414,00	Kaligawe		Tanah Milik Pemda	Pembelian	227.581.489,00
2	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-Lain (Dst)	Baik	380,00			Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.121.614.206,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
3	Bangunan Gedung Instalasi Lain-Lain	Baik	3.850,00	Kota Semarang			Pembelian	3.147.808.306,00
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	8.000,00	Jl. Kaligawe Raya		Tanah Milik Pemda	Hibah	467.045.842,00
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	43.197,97	Kota Semarang			Pembelian	24.588.487.336,00
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	122.314,73	Kota Semarang			Pembelian	23.683.633.157,20
7	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	342,00	Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	200.373.340,00
8	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	5.000,00	Kaligawe (Jl Sawah Besar Xiii)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	200.418.601,00
9	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Baik		Ruang Rapat Lt 3 Kantor Disperkim			Pembelian	348.385.015,00
10	Bangunan Gedung Musium Semi Permanen	Baik	126,15	Kel Mugassari			Pembelian	137.742.369,00
11	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik		Jl Dukuh			Pembelian	200.582.551,00
12	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	Baik		Kota Semarang			Hibah	398.064.284,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
13	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-Lain (Dst)	Baik		Kota Semarang			Pembelian	297.848.809,00
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik		Kota Semarang			Hibah	12.373.572.964,00
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik					Pembelian	3.838.042.377,00
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik Dan Kurang Baik	96.212,90	Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.232.592.108,00
17	Bangunan Gedung Tempat Or Lain-Lain (Dst)	Baik	150,00	Jl Tanggungrejo Lor		Tanah Milik Pemda	Pembelian	547.960.000,00
18	Bangunan Gudang Lain-Lain (Dst)	Baik	6.261,23	Kota Semarang			Pembelian	5.519.577.144,00
19	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	54.979,00	Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.807.203.809,00
20	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik		Jl Jolotundo Kel Sambirejo Kec Gayamsari			Pembelian	96.355.396,00
21	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen		200,00	Halaman Balaikota		Tanah Milik Pemda	Pembelian	178.537.234,00
22	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	7.818,84	Kota Semarang			Pembelian	5.967.156.591,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
23	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	494,32	Kota Semarang			Pembelian	4.434.924.303,00
24	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-Lain (Dst)	Baik	2.000,00	Jl. Kaligawe		Tanah Milik Pemda	Pembelian	316.526.605,00
25	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (Dst)	Baik	3.428,00	Kota Semarang			Pembelian	32.915.353.195,40
26	Flat/Rumah Lain-Lain (Dst)	Baik	5.607,20	Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	403.471.951,00
27	Flat/Rumah Susun Permanen	Baik	21,00	Kota Semarang			Hibah	5.289.716.580,00
28	Flat/Rumah Susun Permanen	Baik	34.337,00	Kota Semarang			Pembelian	33.232.733.580,00
29	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	48,00	Kota Semarang			Pembelian	435.857.500,00
30	Gedung Pos Jaga Darurat	Baik	24,00	Uptd Iplt /Pal (Jl Tanggungrejo Lor)			Pembelian	186.913.500,00
31	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	29.525,00	Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.313.299.950,00
32	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Baik		Jl Wolter Monginsidi			Pembelian	198.719.000,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
33	Makam Bersejarah	Baik	10.343,00	Kota Semarang			Pembelian	62.005.777.323,40
34	Pagar Permanen	Baik	101.299,16	Kota Semarang			Pembelian	8.466.189.189,00
35	Rumah Negara Golongan Iii Lain-Lain	Baik	2.594,00	Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	353.379.565,00
36	Selasar	Baik		Kota Semarang			Pembelian	397.302.000,00
37	Taman Permanen	Baik	1.000,00	Jl Kapten Piere Tendean (Signature Park)			Hibah	144.824.000,00
38	Taman Permanen	Baik	2.948,99	Kota Semarang			Pembelian	2.206.946.349,00
39	Tugu Kemerdekaan	Baik	15.000,00	Alteri		Tanah Milik Pemda	Pembelian	623.348.023,00
40	Tugu Lainnya (Dst)	Baik	500,00	Jl Pandanaran		Tanah Milik Pemda	Pembelian	521.517.865,00
41	Tugu Pembangunan	Baik	100,00	Jl. Menteri Supeno		Tanah Milik Pemda	Pembelian	198.586.000,00
42	Tugu Peringatan Lainnya	Baik	700,00	Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.698.620.825,00

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Target kinerja dan rencana penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra telah terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Capaian kinerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.5. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan juga mengalami kenaikan dengan tingkat serapan anggaran cukup baik.

a. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman. Persentase capaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebagian besar melebihi 100%, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Indikator Tujuan dan Sasaran																		
1	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	Persen			100	100	97	97,5	98	96,34	96,77	96,34	99,57	99,91	96,34%	96,77%	99,32%	101,45%	101,95%
2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh*	Persen			0	0	76	52	36	0,21	0,14	76,62	40,55	18,78	82,64%**	87,72%**	99,18%	120,83%	147,83%
3	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan	Persen			74,54	75,32	76,53	77,53	78,53	75,53	75,93	80,25	81,23	81,59	101,33%	100,81%	104,86%	104,77%	103,90%
4	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persen			45,76	46,26	44,26	44,31	44,36	44,21	44,23	44,36	44,48	44,6	96,61%	95,61%	100,23%	100,38%	100,54%
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai			-	-	72	72,5	73	-	-	72,91	72,91	77,85	-	-	101,26%	100,57%	106,64%
	Indikator Kinerja Kunci																		
1	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen		100 (dari 431,54 Ha)	-	-	24	48	64	-	-	23,38	59,45	81,22	-	-	97,42%	123,85%	126,91%
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit		1.133	-	-	1.000	1.000	1.000	934	1.670	1.713	1.332	1.729	-	-	171,30%	133,20%	172,90%
3	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen		100	100	100	100	100	100	100 (9 perum)	100 (10 perum)	100 (25 perum)	100 (16 perum)	100 (17 perum)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	Unit / 1000 penduduk		20,84	-	34,7	17,7	18,49	19,28	45,50	41,01	40,05	39,05	37,47	-	118,18%	226,27%	211,20%	194,35%
5	Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	Persen		100	-	100	100	100	100	95,87	96,96	100,00	100,00	101,21	-	96,96	100,00	100,00	101,21

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	Lampu								73.141	74.815	77.557	79.718	80.542					
	Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang	Lampu								76.292	77.161	77.557	79.718	79.580					
6	Rasio permukiman layak huni	Persen			-	-	-	-	-	98,17	98,63	98,34	98,79	99,31	-	-	-	-	-
	Indikator SPM																		
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (1 SR melayani 4 jiwa)	Persen		100	-	-	98	69,69	55,75	-	-	98,94	99,62	99,8	-	-	100,96%	142,95%	179,01%
2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen		92,75	-	-	88,51	90,86	92,69	86,51	98,93	98,94	99,04	99,1	-	-	111,78%	109,00%	106,92%
3	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen		100 (30 unit)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen		100 (184 unit)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Indikator TPB																		
1	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	Persen			100	100	98	69,69	55,75	96,28	97,14	98,94	99,62	99,8	96,28%	97,14%	100,96%	142,95%	179,01%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Persen			-	-	66,04	68,99	71,53	96,28	96,28	96,28	96,28	96,28	-	-	145,79%	139,56%	134,60%
3	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Persen			-	-	88,51	90,86	92,69	91	91	91	91	91	-	-	102,81%	100,15%	98,18%
4	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun	Unit			-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
5	Rasio Ruang Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Semarang (%)	Persen			-	-	44,26	44,31	44,36	44,21	44,23	44,36	44,48	44,73	-	-	100,23%	100,38%	100,83%

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
3	Satuan kinerja	13	;Realisasi tahun ketiga renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
5	Target dari kementerian terkait misalnya	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun

- Rumus rasio capaian adalah: $\frac{Realisasi\ tahun\ n}{Target\ tahun\ n} \times 100\%$
- Rumus rasio untuk capaian indikator negatif adalah: $\frac{Target\ tahun\ n - (Realisasi\ tahun\ n - Target\ tahun\ n)}{Target\ tahun\ n} \times 100\%$
- Rumus rasio untuk capaian pada indikator bertanda ** adalah: $\frac{1}{1 + Realisasi\ tahun\ n} \times 100\%$
- Indikator yang merupakan indikator negatif diberi tanda *
- Rasio capaian pada indikator negatif yang memiliki target bernilai 0 (nol) diberi tanda **

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahun 2020																	
Program Penerangan Jalan Umum	5.782.890.940	N/A	N/A	N/A	N/A	5.774.387.306	N/A	N/A	N/A	N/A	99,85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pendataan Survey Lapangan Pemasangan PJU	295.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	295.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemasangan Lampu High Mast	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tambah Daya/KWH Meter Baru	249.185.953	N/A	N/A	N/A	N/A	248.186.029	N/A	N/A	N/A	N/A	99,60%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemasangan Lampu PJU	90.074.700	N/A	N/A	N/A	N/A	90.074.700	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operasional dan Pemeliharaan PJU	5.147.830.287	N/A	N/A	N/A	N/A	5.140.326.577	N/A	N/A	N/A	N/A	99,85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Peralatan Operasional PJU	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Lampu PJU	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	13.361.342.000	N/A	N/A	N/A	N/A	13.326.932.151	N/A	N/A	N/A	N/A	99,74%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan RTH	1.754.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.743.130.769	N/A	N/A	N/A	N/A	99,35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Kota	10.084.089.400	N/A	N/A	N/A	N/A	10.081.911.582	N/A	N/A	N/A	N/A	99,98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan Taman-Taman Baru	1.522.752.600	N/A	N/A	N/A	N/A	1.501.889.800	N/A	N/A	N/A	N/A	98,63%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Air Limbah	1.727.802.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.554.424.179	N/A	N/A	N/A	N/A	89,97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Infrastruktur Sanitasi	1.069.573.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.068.823.429	N/A	N/A	N/A	N/A	99,93%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan dan Perbaikan MCK	658.229.000	N/A	N/A	N/A	N/A	485.600.750	N/A	N/A	N/A	N/A	73,77%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	870.217.000	N/A	N/A	N/A	N/A	802.229.520	N/A	N/A	N/A	N/A	92,19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	870.217.000	N/A	N/A	N/A	N/A	802.229.520	N/A	N/A	N/A	N/A	92,19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.163.755.000	N/A	N/A	N/A	N/A	3.868.729.787	N/A	N/A	N/A	N/A	92,91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.903.000	N/A	N/A	N/A	N/A	96,77%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	715.950.000	N/A	N/A	N/A	N/A	641.353.218	N/A	N/A	N/A	N/A	89,58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.908.385	N/A	N/A	N/A	N/A	99,91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan jasa kebersihan kantor	47.792.000	N/A	N/A	N/A	N/A	47.709.600	N/A	N/A	N/A	N/A	99,83%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan alat tulis kantor	158.605.000	N/A	N/A	N/A	N/A	158.495.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,93%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.217.000	N/A	N/A	N/A	N/A	26.458.000	N/A	N/A	N/A	N/A	97,21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8.140.000	N/A	N/A	N/A	N/A	8.140.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan peralatan rumah tangga	105.834.000	N/A	N/A	N/A	N/A	105.374.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,57%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan makanan dan minuman	207.713.000	N/A	N/A	N/A	N/A	207.422.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,86%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	245.264.000	N/A	N/A	N/A	N/A	245.263.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	88.750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	88.470.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,68%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	1.955.490.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.738.513.084	N/A	N/A	N/A	N/A	88,90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan sistem informasi kepegawaian	500.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	498.719.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,74%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.114.811.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.106.556.052	N/A	N/A	N/A	N/A	99,87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	959.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	959.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	135.711.900	N/A	N/A	N/A	N/A	135.552.300	N/A	N/A	N/A	N/A	99,88%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	389.201.500	N/A	N/A	N/A	N/A	389.201.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	897.120.000	N/A	N/A	N/A	N/A	892.052.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,44%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	2.634.760.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.634.760.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	117.194.000	N/A	N/A	N/A	N/A	115.599.500	N/A	N/A	N/A	N/A	98,64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional	981.823.600	N/A	N/A	N/A	N/A	980.390.752	N/A	N/A	N/A	N/A	99,85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sosialisasi peraturan perundang - undangan	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	425.137.000	N/A	N/A	N/A	N/A	348.303.300	N/A	N/A	N/A	N/A	81,93%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu	373.608.000	N/A	N/A	N/A	N/A	297.820.000	N/A	N/A	N/A	N/A	79,71%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan LKPJ SKPD	5.766.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.766.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan LAKIP	5.763.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.762.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,99%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.947.500	N/A	N/A	N/A	N/A	98,95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.738.000	N/A	N/A	N/A	N/A	94,76%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.887.000	N/A	N/A	N/A	N/A	97,74%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.755.600	N/A	N/A	N/A	N/A	95,11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan pelaporan target pendapatan	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.714.200	N/A	N/A	N/A	N/A	94,28%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan Renja SKPD	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.963.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,26%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan RKA dan DPA Murni	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.990.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.959.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Lingkungan Sehat Perumahan	45.917.907.560	N/A	N/A	N/A	N/A	43.586.948.782	N/A	N/A	N/A	N/A	94,92%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penangan dan Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Nelayan	9.338.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.338.598.542	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peningkatan dan Penanganan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	10.149.372.100	N/A	N/A	N/A	N/A	10.149.365.100	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Optimalisasi Pengelolaan Sarpras Lingkungan Permukiman	626.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	573.918.120	N/A	N/A	N/A	N/A	91,62%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	18.991.332.460	N/A	N/A	N/A	N/A	16.725.622.020	N/A	N/A	N/A	N/A	88,07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.673.003.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.671.845.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Inventarisasi dan Penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas Perkotaan	139.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	127.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	91,67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	2.184.408.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.181.483.374	N/A	N/A	N/A	N/A	99,87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Registrasi Makam	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemakaman	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Lahan TPU	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang	1.684.357.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.684.332.374	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Optimalisasi Pelayanan Pemakaman	281.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	278.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	98,97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan Sarpras TPU se Kota Semarang	218.751.000	N/A	N/A	N/A	N/A	218.751.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	4.795.877.500	N/A	N/A	N/A	N/A	4.789.897.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,88%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa dan Rumah Pondok Boro/Sosial	1.960.677.500	N/A	N/A	N/A	N/A	1.960.677.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan Rusun, Rusunawa dan Rumah Pondok Boro/Sosial	2.580.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.574.020.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,77%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Rusunawa	255.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	255.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peringatan Hari Perumahan Nasional	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2021 - 2024																	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	N/A	2.589.077.000	1.635.880.281	1.760.762.481	2.734.030.200	N/A	2.143.655.419	1.494.475.087	1.567.196.651	2.696.169.115	N/A	82,80%	91,36%	89,01%	98,62%	8,70%	15,54%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	2.589.077.000	1.635.880.281	1.760.762.481	2.734.030.200	N/A	2.143.655.419	1.494.475.087	1.567.196.651	2.696.169.115	N/A	82,80%	91,36%	89,01%	98,62%	8,70%	15,54%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	N/A	250.000.000	5.599.345.000	5.928.381.000	3.258.251.480	N/A	249.995.000	1.404.719.136	5.928.376.000	3.252.801.685	N/A	100,00%	25,09%	100,00%	99,83%	700,19%	246,27%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	N/A	250.000.000	5.599.345.000	5.928.381.000	3.258.251.480	N/A	249.995.000	1.404.719.136	5.928.376.000	3.252.801.685	N/A	100,00%	25,09%	100,00%	99,83%	700,19%	246,27%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	N/A	3.365.743.000	4.369.063.419	6.055.291.941	3.354.872.690	N/A	3.270.785.429	4.251.628.633	5.752.557.101	3.229.921.785	N/A	97,18%	97,31%	95,00%	96,28%	7,94%	7,15%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	3.365.743.000	4.369.063.419	6.055.291.941	3.354.872.690	N/A	3.270.785.429	4.251.628.633	5.752.557.101	3.229.921.785	N/A	97,18%	97,31%	95,00%	96,28%	7,94%	7,15%
Program Pengembangan Permukiman	N/A	109.245.336.400	133.604.810.565	155.372.686.535	1.891.443.655	N/A	99.016.267.181	130.927.986.887	147.077.453.557	1.869.253.798	N/A	90,64%	98,00%	94,66%	98,83%	-20,06%	-18,06%
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	N/A	109.245.336.400	133.604.810.565	155.372.686.535	1.891.443.655	N/A	99.016.267.181	130.927.986.887	147.077.453.557	1.869.253.798	N/A	90,64%	98,00%	94,66%	98,83%	-20,06%	-18,06%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	N/A	5.200.000.000	6.092.396.056	8.146.853.456	2.359.456.904	N/A	5.144.376.156	5.904.522.300	7.899.503.702	2.239.536.640	N/A	98,93%	96,92%	96,96%	94,92%	-6,72%	-7,70%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	N/A	5.200.000.000	6.092.396.056	8.146.853.456	2.359.456.904	N/A	5.144.376.156	5.904.522.300	7.899.503.702	2.239.536.640	N/A	98,93%	96,92%	96,96%	94,92%	-6,72%	-7,70%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	37.627.018.204	33.891.976.063	54.063.046.955	48.422.716.428	N/A	31.554.678.077	32.640.530.149	51.872.798.181	46.395.592.445	N/A	83,86%	96,31%	95,95%	95,81%	13,05%	17,27%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	460.851.000	54.789.080	64.475.340	110.227.320	N/A	146.358.800	54.126.800	63.471.560	108.593.576	N/A	31,76%	98,79%	98,44%	98,52%	0,18%	8,45%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	22.326.666.587	19.762.624.307	19.401.412.486	19.582.554.222	N/A	20.473.837.788	18.714.802.712	18.383.073.892	18.935.393.734	N/A	91,70%	94,70%	94,75%	96,70%	-4,13%	-2,45%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	155.071.000	259.854.323	478.824.318	831.859.642	N/A	135.847.000	253.210.780	470.975.105	787.676.000	N/A	87,60%	97,44%	98,36%	94,69%	75,19%	79,88%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	2.017.494.727	2.107.432.711	5.243.108.345	2.873.533.815	N/A	1.362.097.969	2.044.206.152	4.928.238.017	2.627.933.377	N/A	67,51%	97,00%	93,99%	91,45%	36,02%	48,16%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	1.715.000.000	1.598.968.000	12.843.981.206	8.101.094.873	N/A	1.614.426.000	0	12.380.130.430	7.245.634.500	N/A	94,14%	0,00%	96,39%	-	219,86%	-47,16%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	2.600.808.890	2.753.369.481	3.379.144.902	3.496.394.744	N/A	2.243.292.683	2.640.521.675	3.222.710.128	3.365.525.621	N/A	86,25%	95,90%	95,37%	96,26%	10,69%	14,73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	8.351.126.000	8.953.906.161	12.652.100.358	13.427.051.812	N/A	5.578.817.837	8.933.662.030	12.424.199.049	13.325.687.307	N/A	66,80%	99,77%	98,20%	99,25%	18,22%	35,49%
Program Pengembangan Perumahan	N/A	295.404.000	771.134.064	4.272.505.839	5.843.304.982	N/A	268.330.000	732.047.820	4.173.487.560	5.720.666.754	N/A	90,83%	94,93%	97,68%	97,90%	217,29%	226,67%
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	N/A	229.930.000	0	399.625.000	499.700.000	N/A	229.330.000	0	382.663.000	490.561.170	N/A	99,74%	0,00%	95,76%	98,17%	-24,99%	-23,93%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum datau Rumah Khusus	N/A	0	581.608.112	3.363.739.324	4.539.401.707	N/A	0	543.744.420	3.285.294.905	4.528.888.554	N/A	0,00%	93,49%	97,67%	99,77%	171,10%	180,68%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	N/A	65.474.000	189.525.952	509.141.515	804.203.275	N/A	39.000.000	188.303.400	505.529.655	701.217.030	N/A	59,57%	99,35%	99,29%	87,19%	138,69%	196,67%
Program Kawasan Permukiman	N/A	18.839.130.875	20.663.576.500	12.545.495.052	16.178.366.015	N/A	18.533.578.500	20.175.344.793	12.384.428.916	16.082.836.381	N/A	98,38%	97,64%	98,72%	99,41%	-0,21%	0,04%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	N/A	0	0	0	309.400.000	N/A	0	0	0	298.626.519	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	N/A	100.000.000	98.133.500	0	0	N/A	0	98.133.500	0	0	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,96%	-33,33%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	N/A	18.739.130.875	20.565.443.000	12.545.495.052	15.868.966.015	N/A	18.533.578.500	20.077.211.293	12.384.428.916	15.784.209.862	N/A	98,90%	97,63%	98,72%	78,04%	-0,92%	-0,85%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	N/A	29.953.478.000	72.531.262.458	124.993.774.147	294.189.525.112	N/A	26.083.745.491	56.281.188.441	120.632.102.730	278.685.520.138	N/A	87,08%	77,60%	96,51%	94,73%	116,61%	120,38%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	N/A	29.953.478.000	72.531.262.458	124.993.774.147	294.189.525.112	N/A	26.083.745.491	56.281.188.441	120.632.102.730	278.685.520.138	N/A	87,08%	77,60%	96,51%	94,73%	116,61%	120,38%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	N/A	37.131.911.807	0	0	0	N/A	33.786.613.678	0	0	0	N/A	90,99%	0	0	0	-33,33%	-33,33%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	N/A	37.131.911.807	0	0	0	N/A	33.786.613.678	0	0	0	N/A	90,99%	0	0	0	-33,33%	-33,33%

Keterangan:

1	Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
3	Anggaran tahun kedua renstra disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
4	Anggaran tahun ketiga renstra disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
5	Anggaran tahun keempat renstra disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
6	Anggaran tahun elima renstra disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keterangan 2-6
7	Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keterangan 7 -11
8	Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun		
9	Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun		
11	Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, kelompok yang menjadi sasaran pelayanan adalah warga masyarakat adalah sebagai bagai berikut :

1. Pada program penyediaan hunian layak adalah masyarakat Kota Semarang yang berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan penerima bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, penderita stunting, masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrim dan masyarakat yang terkena bencana serta relokasi program pemerintah dan penduduk Kota Semarang yang kesulitan mengakses hunian layak karena keterbatasan ekonomi.
2. Pada program Penyediaan air minum adalah kelompok warga masyarakat yang tidak mendapat akses air minum layak.
3. Pada program sanitasi adalah masyarakat yang tidak mendapat akses sanitasi layak dan pengelolaan limbah.
4. Pada program pemenuhan pemakaman adalah warga masyarakat Kota Semarang yang membutuhkan fasilitasi pemakaman di TPU Kota Semarang.

2.1.5. Mitra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bermitra dengan berbagai stakeholder antara lain dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui bantuan keuangan (dana transfer) dan juga pihak swasta melalui program CSR serta dengan perangkat daerah lain melalui sinkronisasi program dan kegiatan.

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun kebijakan, perencanaan, pembangunan infrastruktur dasar permukiman, termasuk SPAM skala kawasan/komunal, serta pengawasan pelayanan publik terkait perumahan dan permukiman. Peningkatan jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman menjadi salah satu indikator kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Penyediaan air minum dilakukan dengan pembangunan sumur air tanah dalam, namun saat ini pengambilan air tanah dalam sudah dibatasi karena Kota Semarang mengalami penurunan tanah yang cukup signifikan per tahun. Oleh karena itu Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman membangun membangun SPAM berbasis kawasan, khususnya di permukiman MBR, kawasan kumuh dan kawasan yang belum terlayani pelayanan air minum perpipaan. Dalam Pengelolaan SPAM, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman melakukan kerjasama dengan Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha Milik Daerah Tirta Moedal yang bergerak dalam kegiatan penyediaan air minum perpipaan bagi masyarakat. BUMD Tirta Moedal menyediakan, mengolah, mendistribusikan, dan melayani kebutuhan air bersih/air minum untuk rumah tangga, industri, dan fasilitas umum. Dengan adanya kerjasama antara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan BUMD Tirta Moedal maka pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum layak dan aman bagi masyarakat Kota Semarang akan lebih optimal.

2.1.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2) Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan perangkat daerah
3) Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
4) Tuntutan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Kerjasama antarperangkat daerah serta kemitraan dengan swasta

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.
2) Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan potensi di segala bidang yang ada serta pelayanan apa saja yang disediakan untuk melayani masyarakat.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Dalam menentukan permasalahan dan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, telaahan tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta dengan mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu: “Penyediaan sarana prasarana permukiman masih perlu ditingkatkan” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
"Penyediaan sarana prasarana permukiman masih perlu ditingkatkan"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyediaan akses air minum layak belum optimal
2.	Pencapaian sanitasi aman dan sistem pengelolaan air limbah domestik masih perlu ditingkatkan	Pengelolaan limbah domestik dan sanitasi belum optimal
		Kondisi lingkungan IPLT yang terdampak penurunan muka tanah dan rob
		Akses dan infrastruktur pengolahan limbah tidak optimal
3.	Masih tingginya angka *backlog* perumahan	Belum optimalnya pendataan rumah bagi warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah
		Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana/relokasi program pemerintah
		Belum optimalnya pengelolaan rumah susun
4.	Perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni
5.	Belum optimalnya penataan Perumahan dan Kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan dan kenyamanan	Tindak lanjut kebijakan PKP belum optimal
6.	Kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) lingkungan perlu ditingkatkan	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana lingkungan
7.	Kualitas dan kuantitas PSU Perumahan perlu ditingkatkan	Belum optimalnya penyelenggaraan PSU Perumahan
8.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik masih perlu ditingkatkan	Penyediaan RTH publik masih perlu ditingkatkan
9.	Belum optimalnya pengelolaan lahan pemakaman umum	Penyediaan lahan pemakaman perlu ditingkatkan
10.	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Disperkim yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Disperkim
		Belum optimalnya pengelolaan administrasi, penyusunan, dan pelaporan keuangan
11.	Belum optimalnya kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Disperkim	Belum optimalnya Kemampuan SDM Disperkim
		Belum optimalnya penyediaan peralatan, perlengkapan, dan pelaporan administrasi perkantoran Disperkim
		Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran Disperkim
		Belum optimalnya pengelolaan Pelaksanaan Jasa Penunjang Disperkim
		Belum optimalnya pemeliharaan aset Disperkim

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Isu-isu pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Kebutuhan air tahun 2045 diproyeksikan meningkat 31 % dari kebutuhan air tahun 2020
- Kapasitas tampung per kapita Indonesia berada di bawah negara-negara dengan variabilitas musim yang serupa
- Kapasitas idle SPAM dan NRW masih tinggi
- 80 % dari air yang digunakan masyarakat akan menjadi air limbah domestik
- Menurunnya kualitas dan kuantitas mata air
- Rendahnya kinerja BUMD air minum (34,60% BUMD berkinerja tidak sehat)
- Hanya 10,21 % (2023) rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi aman
- Masih ada 203 Kabupaten/Kota yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik (IPLT atau IPAL)
- Akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan
- Intervensi perumahan eksisting belum menjangkau seluruh segmentasi masyarakat termasuk pekerja informal, terutama dari aspek pembiayaan perumahan
- Keterbatasan kewenangan Pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan MBR berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
- Belum optimalnya keterhunian dan pengelolaan rumah sehingga berpotensi pada menurunnya kualitas bangunan dan lingkungan
- Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru.

Prioritas yang berkaitan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :

1. Pengentasan kemiskinan dengan tujuan menurunkan tingkat kemiskinan melalui program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
2. Penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan MBR melalui program 3 juta rumah dan skema pembiayaan
3. Reformasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, inklusif, dan responsif.

Dengan demikian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu merumuskan kebijakan dalam menyediakan akses hunian layak dan terjangkau, penanganan permukiman kumuh secara terpadu, dan inovasi pembiayaan penyediaan hunian layak yang tertuang dalam program dan kegiatannya.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum,

hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif"

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengimplementasikan pokok Visi 2: Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif yang selaras dengan Misi 3: Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai paraf hidup yang layak. Tujuan yang akan dicapai yaitu menurunnya kemiskinan secara inklusif.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah "Menurunnya beban pengeluaran masyarakat".

Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih yang dilaksanakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Pengembangan Infrastruktur Kota (Penanganan Banjir dan Rob, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah dan Penganekaragaman Hayati) dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan IPAL/SPALDT
2. Peningkatan Akses Jalan dan Konektivitas ke Wilayah Pengembangan, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Akses Jalan dan Konektivitas ke Wilayah Pengembangan
3. Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal dilaksanakan melalui Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal
4. Penciptaan ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi aktivitas budaya dengan pengelolaan yang berpihak pada seniman dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan taman publik
5. Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik dilaksanakan melalui kegiatan Pemenuhan rumah layak huni dan pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan dan Penyediaan Rumah Bersubsidi
6. Peningkatan upaya penghijauan wilayah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator :

1. Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari
2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman
3. Persentase areal kawasan kumuh
4. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni
5. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
6. Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani
7. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
8. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU
9. Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 penduduk

c. Telaahan Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

Renstra Kementerian PUPR 2020–2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020–2024, dengan fokus utama pada infrastruktur untuk mendukung Visi Indonesia Maju. Terdapat 5 (lima) program besar yang ditetapkan yaitu :

1. Program Infrastruktur Sumber Daya Air
2. Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan
3. Program Infrastruktur Permukiman
4. Program Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
5. Program Dukungan Manajemen

Sasaran pokok dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman yang terdapat dalam Renstra yaitu :

1. Penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).
3. Pengembangan kawasan perumahan baru yang berkelanjutan.
4. Penyediaan infrastruktur dasar permukiman (air minum, sanitasi, persampahan, drainase).
5. Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh perkotaan.
6. Penguatan pembiayaan perumahan (FLPP, subsidi bunga, skema KPR untuk MBR)

Sasaran tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas pokok Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Fasilitasi pembangunan rumah subsidi, penyediaan lokasi, kerja sama dengan pengembang
2. Program bedah rumah/BSPS melalui APBD maupun sinergi dengan APBN
3. Perencanaan kawasan, dan pengendalian pembangunan perumahan
4. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana umum seperti jalan, drainase, air minum dan sanitasi
5. Penataan kawasan kumuh, peremajaan lingkungan, peningkatan PSU
6. Penyusunan regulasi daerah terkait kebijakan perumahan dan kawasan permukiman

Selaras dengan sasaran Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020–2024, maka dalam perencanaan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan berfokus dalam pelaksanaan program kegiatan penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas RTLH, penanganan kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, dan penguatan pembiayaan perumahan merupakan.

d. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah “JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

1. Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu :
2. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
5. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
6. Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah,

perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
7. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi

Misi kedua dalam RPJMD Provinsi 2025-2029 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Perdesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan, dengan Sasaran : Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui :
   a. peningkatan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati;
   b. peningkatan inisiatif dan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim;
   c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui pengelolaan limbah domestik dan industri baik padat maupun cair;
   d. peningkatan ketahanan sumber daya air dengan penguatan infrastruktur, pengelolaan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air secara aman dan berkelanjutan;
   e. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif;
   f. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
   g. pelaksanaan reforma agraria dan penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
   h. peningkatan keterwujudan penataan ruang.
2. Pengurangan risiko bencana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap, melalui:
   a. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
   b. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
   c. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
   d. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
   e. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
   f. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
   g. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

Program Prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut:

1. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa;
2. Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren;

3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
5. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;
6. Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai;
7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri;
8. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;
10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 , terdapat sinkronisasi dalam program prioritas dengan sasaran yang ditetapkan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun kedepan yaitu program Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menetapkan sasaran Meningkatnya Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dengan indikator persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.

f. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dalam telaah revisi RTRW Kota Semarang ini, adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 untuk bidang urusan pekerjaan umum & penataan ruang,perumahan rakyat & kawasan permukiman dapat dijabarkan pada penjelasan berikut ini.

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kota Semarang untuk diacu dalam penyusunan Renstra PD, namun tidak ada implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur

dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana yang diamanatkan kedua peraturan perundangan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang harus dilakukan kegiatan peninjauan kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang ini dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan kebijakan & strategi pengembangan kawasan strategis. Pada revisi RTRW Kota Semarang, kebijakan penataan ruang meliputi:

a. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional;
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum;
c. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota;
d. Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum meliputi :

a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
b. Mengembangkan prasarana sumber daya air;
c. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
d. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
e. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota meliputi :

a. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
b. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
c. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
d. Mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
e. Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi meliputi:

- Peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
- Peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.

Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang dan rendah meliputi:

- Peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau, dan
- Penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat

puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama. Indikasi program yang berkaitan dengan perwujudan struktur ruang dalam implikasi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang meliputi:

a. Infrastruktur perkotaan

- Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan (jaringan primer, sekunder, pengembangan fasilitas pengolahan air minum), dan pengembangan sistem non perpipaan (penggalian atau pengeboran air tanah, pengolahan air payau dan air laut, penyediaan terminal air untuk kawasan-kawasan yang belum terlayani jaringan perpipaan).

- Rencana prasarana air limbah meliputi sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal (peningkatan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual pada kawasan perumahan kepadatan rendah, pengembangan dan peningkatan sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi.

Berkaitan ketentuan peraturan zonasi terkait urusan perumahan rakyat & Kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum & penataan ruang dapat dikaji langsung melalui dokumen revisi RTRW. Sedangkan, indikasi program yang berkaitan dengan perwujudan pola ruang dalam implikasi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang meliputi:

a. Kawasan peruntukan lindung;
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- Kawasan perlindungan setempat;
- Ruang terbuka hijau;
b. Kawasan budidaya;
- Kawasan perumahan, meliputi peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh melalui konsolidasi lahan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Semarang, pengaturan kebijakan penyediaan sarana & prasarana permukiman, pembangunan Rusun pekerja

- Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi pembangunan Technopark Kota Semarang.

Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 untuk kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Program Pemanfaatan Pembangunan Wilayah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER DANA
I	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**			
A	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR			
1	Prasarana sumber air			
	- Jaringan air baku untuk air bersih	Seluruh wilayah kota	2020-2030	
B	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN			
1	Rencana Sistem Penyediaan Air Minum			
	a. Pengembangan sistem jaringan perpipaan			
	- Jaringan primer	Seluruh wilayah kota	2020-2030	APBD Swasta
	- Jaringan sekunder	Seluruh wilayah kota	2020-2030	APBD Swasta
	- Pengembangan fasilitas pengolahan air minum	Seluruh wilayah kota	2020-2030	APBD Swasta
	b. Pengembangan sistem non perpipaan			
	- Penggalian atau pengeboran air tanah	Seluruh wilayah kota	2020-2030	APBD Swasta
	- Penyediaan terminal air untuk kawasan- kawasan yang belum terlayani jaringan perpipaan	Seluruh wilayah kota	2020-2030	APBD Swasta
2	Rencana Prasarana Air Limbah			
	a. Sistem pembuangan air limbah industri dan kawasan komersial			
	- Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah industri	Kecamatan Tugu Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Genuk Kecamatan Pedurungan	2020-2030	Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER DANA
	- Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.	Seluruh Wilayah Kota	2020-2030	APBD
	b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal			
	- Peningkatan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual pada kawasan perumahan kepadatan rendah	Kecamatan Tembalang Kecamatan Banyumanik Kecamatan Gunungpati Kecamatan Mijen Kecamatan Ngaliyan	2020-2030	APBD
	- Pengembangan dan peningkatan sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi	Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Genuk Kecamatan Pedurungan	2020-2030	APBD
II	**PERWUJUDAN POLA RUANG**			
A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG			
1	Ruang Terbuka Hijau	Penambahan RTH menuju 20% melalui: - Pembangunan taman dan lapangan - Penghijauan pemakaman - Peningkatan kualitas RTH	2020-2025	APBN APBD Provinsi APBD
	- Perencanaan reklamasi perairan (P/RTH)	Penambahan RTH menuju 20% melalui: - Pembangunan taman - Peningkatan kualitas RTH	2021-2025	APBN APBD Provinsi APBD
B	KAWASAN BUDIDAYA			
1	Kawasan perumahan			
	- Peremajaan perumahan di kawasan - kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Semarang	Seluruh wilayah kota	2020-2030	APBN APBD

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER DANA
	- Pengaturan kebijakan penyediaan sarana & prasarana permukiman	Seluruh wilayah kota	2020-2030	APBN APBD
	- Pembangunan rusun pekerja		2021-2025	APBN

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

a. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah :

1. Kualitas dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   - Permasalahan: Alih fungsi lahan dan keterbatasan RTH di kawasan perkotaan.
   - Implikasi: Disperkim perlu mengintegrasikan kebijakan pembangunan perumahan dengan target 30% RTH (20% publik, 10% privat).
2. Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh
   - Permasalahan: Masih terdapat kantong permukiman kumuh di wilayah Kota Semarang (khususnya di bantaran sungai, pesisir, dan daerah padat penduduk).
   - Implikasi: Program peremajaan kota (urban renewal), penataan kawasan kumuh, serta penyediaan hunian layak yang ramah lingkungan.
3. Kerentanan Bencana Lingkungan (Banjir, Rob, Longsor)
   - Permasalahan: Kota Semarang sering terdampak banjir rob dan banjir perkotaan akibat drainase tidak memadai.
   - Implikasi: Disperkim harus mengintegrasikan tata ruang perumahan dan permukiman dengan mitigasi bencana serta adaptasi perubahan iklim.
4. Kualitas Air Bersih dan Sanitasi
   - Permasalahan: Masih ada wilayah dengan keterbatasan akses air bersih dan sistem sanitasi layak.
   - Implikasi: Pengembangan sistem air minum berbasis jaringan perpipaan, septic tank komunal, dan infrastruktur sanitasi berkelanjutan.
5. Efisiensi Energi dan Bangunan Hijau
   - Permasalahan: Pembangunan perumahan cenderung belum memperhatikan prinsip efisiensi energi.
   - Implikasi: Mendorong penerapan konsep green building dan pemanfaatan energi terbarukan di kawasan perumahan.
6. Perubahan Iklim dan Daya Dukung Lingkungan
   - Permasalahan: Pertumbuhan penduduk perkotaan meningkatkan kebutuhan perumahan dan tekanan terhadap daya dukung lingkungan.
   - Implikasi: Perlu integrasi antara pembangunan perumahan dengan daya dukung lahan, air, dan lingkungan pesisir.

Isu KLHS bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berkaitan erat dengan pembangunan hunian yang ramah lingkungan, penataan kawasan kumuh, mitigasi bencana, serta penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.

Tabel 2.8.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Kabupaten/Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender (pemenuhan kebutuhan rumah layak huni)
Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi	Penyediaan infrastruktur perkotaan dan konektivitas wilayah yang berkualitas (pencapaian sanitasi aman dan penyediaan air minum layak dan aman)
Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung kota (peningkatan Ruang Terbuka Hijau)
Perlunya memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Penyelenggaraan *good governance* (peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman)

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

g. Substansi Bidang P3MKM (PUG, ARG)

Bidang P3MKM (Perencanaan, Pengendalian, dan Manajemen Kawasan Permukiman) menjadi strategis karena berkaitan dengan:

- Pengentasan permukiman kumuh, dengan target penurunan luas kumuh dari 44,58 ha (2024) hingga 0% di 2029.
- Peningkatan perumahan layak huni, dengan target kenaikan dari 62,33% (2025) menjadi 68,82% (2029).
- Penyediaan akses air minum dan sanitasi aman, yang ditetapkan 100% terpenuhi sepanjang periode 2025–2029.

Isu-isu ini bersinggungan langsung dengan kebutuhan spesifik kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak), sehingga PUG perlu diarusutamakan dalam indikator dan program.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang 2025–2029 mengakui adanya masalah kesenjangan gender pada akses hunian layak. Penerapan PUG dapat dilakukan melalui:

- Integrasi isu gender dalam indikator layanan: misalnya memastikan keterlibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan permukiman.
- Desain program permukiman inklusif: penyediaan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) yang ramah perempuan, anak, dan disabilitas.
- Prioritas bagi rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan dalam program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan relokasi bencana.

Analisis Responsif Gender (ARG) dalam Renstra ini tercermin dari beberapa hal:

- Program perbaikan RTLH diarahkan bagi warga miskin, termasuk rumah tangga rentan.
- Program relokasi korban bencana/ banjir rob menargetkan 100% warga terdampak memperoleh hunian layak.
- Program penyediaan RTH dan PSU diupayakan lebih ramah keluarga dan inklusif gender.

h. Substansi Bidang P3MKM (Kota Layak Anak)

Substansi P3MKM, yang berfokus pada penataan dan peningkatan kualitas permukiman, secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada

pemenuhan hak-hak anak dalam kerangka Kota Layak Anak. Keterkaitan ini bisa dianalisis dari beberapa pilar KLA:

- Hak Anak atas Lingkungan yang Aman dan Layak Huni: P3MKM bertugas menata kawasan permukiman kumuh menjadi layak huni. Ini termasuk penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi yang memadai. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Ramah Anak: Dalam penataan kawasan permukiman, Disperkim juga dapat mengintegrasikan perencanaan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman bermain anak. Ruang-ruang ini menjadi tempat anak berinteraksi, bermain, dan berekspresi secara aman. Hal ini sejalan dengan prinsip KLA yang memastikan anak memiliki ruang publik yang layak.
- Partisipasi Anak: Meskipun tidak secara langsung, program-program pemberdayaan masyarakat di bawah P3MKM dapat menjadi wadah untuk melibatkan anak-anak dalam proses perencanaan permukiman mereka. Misalnya, melalui musrenbang tingkat kelurahan, suara anak-anak bisa disalurkan untuk usulan perbaikan lingkungan yang mereka butuhkan.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat, diproyeksikan Renstra Disperkim 2025-2029 akan memuat program dan kegiatan yang selaras dengan KLA. Beberapa poin potensial yang bisa menjadi pembahasan substansi:

- Pembangunan Infrastruktur Dasar: Prioritas akan diberikan pada penyediaan infrastruktur dasar di kawasan permukiman yang padat penduduk, terutama yang memiliki populasi anak-anak tinggi. Program ini akan mencakup perbaikan sanitasi, pengelolaan air bersih, dan drainase untuk mencegah penyakit yang rentan menyerang anak.
- Revitalisasi Permukiman dan Penyediaan RTH: Program revitalisasi permukiman kumuh tidak hanya akan fokus pada pembangunan fisik, tapi juga penyediaan ruang publik yang inklusif. Ini bisa berupa pembangunan taman, ruang bermain, atau fasilitas olahraga sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak.
- Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat: Melalui program pemberdayaan, Disperkim dapat mengedukasi masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak, tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan fasilitas publik dengan baik. Edukasi ini juga dapat menyentuh isu sanitasi dan kebersihan pribadi sebagai bagian dari pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Secara keseluruhan, kolaborasi antara Disperkim dan KLA menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan penataan kawasan permukiman bukan hanya tentang estetika, melainkan juga tentang menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sesuai dengan visi Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak.

I. Substansi Bidang P3MKM (GDPK)

Bidang P3MKM adalah instrumen utama integrasi GDPK, karena menangani perencanaan, pengendalian, dan manajemen kawasan permukiman yang langsung bersinggungan dengan jumlah dan kebutuhan penduduk. Bidang P3MKM berperan strategis dalam mendukung Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), melalui:

- Perencanaan dan Pengendalian Permukiman:
    - Penanganan kawasan kumuh agar kualitas hidup penduduk meningkat.
    - Penyesuaian tata ruang dengan proyeksi pertumbuhan penduduk.

- Manajemen Kawasan Permukiman:
    - Penyediaan perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).
    - Relokasi korban bencana dengan memperhatikan jumlah penduduk terdampak.
- Penyediaan Sarana Pendukung:
    - Infrastruktur air minum, sanitasi, dan RTH untuk menunjang kesehatan dan daya dukung lingkungan.
    - Fasilitas pemakaman untuk mengantisipasi dinamika kependudukan.

Integrasi P3MKM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Prinsip GDPK, antara lain sebagai berikut:

Aspek GDPK	**Keterkaitan dengan Bidang P3MKM**
Kuantitas penduduk	Target hunian layak naik dari 62,33% (2025) menjadi 68,82% (2029) sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk.
Kualitas penduduk	Pemenuhan 100% akses air minum dan sanitasi aman untuk meningkatkan kesehatan.
Mobilitas penduduk	Relokasi korban bencana dan rob dengan penyediaan hunian layak.
Pembinaan keluarga	Penyediaan perumahan inklusif yang ramah keluarga, RTH, serta PSU lingkungan.
Administrasi kependudukan	Penyediaan rasio pemakaman umum per 1000 penduduk sebagai respon proyeksi demografi.

J. Substansi Bidang P3MKM (Stunting)

Stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sangat dipengaruhi oleh sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan anak-anak sering sakit, sehingga penyerapan nutrisi tidak optimal dan menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, bidang P3MKM memiliki peran krusial dalam intervensi stunting melalui pendekatan lingkungan:

- Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Sehat: P3MKM bertanggung jawab atas penataan kawasan permukiman, termasuk penyediaan fasilitas dasar seperti jamban, sanitasi komunal, sistem drainase, dan akses air bersih. Peningkatan kualitas infrastruktur ini secara langsung mengurangi risiko penyebaran penyakit yang sering menyerang anak, seperti diare.
- Peningkatan Mutu Permukiman: Program Peningkatan Mutu Permukiman fokus pada perbaikan kualitas rumah dan lingkungan di kawasan kumuh. Lingkungan yang tidak kumuh, bersih, dan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang layak akan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kesehatan anak.
- Pemberdayaan Masyarakat: Melalui program pemberdayaan, Disperkim dapat mengedukasi masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Edukasi ini meliputi

kebiasaan mencuci tangan, menggunakan jamban yang sehat, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Proyeksi Program Stunting dalam Renstra Disperkim 2025-2029

Dengan mempertimbangkan peran vital di atas, diproyeksikan Renstra Disperkim Kota Semarang 2025-2029 akan memuat program dan kegiatan yang secara sinergis mendukung upaya penurunan stunting. Beberapa poin potensialnya adalah : Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Penyediaan Sarana Air Bersih.

K. Substansi Bidang P3MKM (Posyandu 6 SPM)

Puskesmas dan Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan primer, yang menjadi bagian dari SPM Bidang Kesehatan. Agar berfungsi optimal, Posyandu memerlukan lingkungan dan fasilitas yang layak. Proyeksi Implementasi dalam Renstra Disperkim 2025-2029 :

- Integrasi Pembangunan Lingkungan Sehat dengan Kesehatan: Disperkim dapat menyelaraskan program penataan permukiman dengan data stunting dan kesehatan dari dinas terkait. Misalnya, prioritas perbaikan drainase dan sanitasi diberikan pada wilayah dengan tingkat penyakit berbasis lingkungan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat: Melalui program pemberdayaan, Disperkim dapat memberikan pelatihan kepada kader Posyandu dan masyarakat tentang pengelolaan sanitasi dan air bersih yang efektif.

Tabel 2.9.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2023	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	98,75%	99,00%	99,25%	99,50%	99,75%	100%	1. Meningkatkan kualitas sumber daya air layak ● Pemeliharaan mutu air melalui konservasi dan pencadangan badan air serta ekosistemnya 2. Meningkatkan pemerataan distribusi air baku ● Peningkatan sumur resapan dan biopori untuk meningkatkan cadangan air tanah ● Pemerataan distribusi dan akses air bersih bagi semua masyarakat	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ● Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ● Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	97,68%	98,14%	98,61%	99,07%	99,54%	100%		
3.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	97,90 m^3/detik	102,04 m^3/detik	106,18 m^3/detik	110,32 m^3/detik	114,46 m^3/detik	118,6 m^3/detik		
4.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Naik	1. Meningkatkan akses terhadap layanan sistem pengelolaan lumpur tinja ● Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) skala kabupaten/kota untuk mengolah lumpur tinja dari septik tank yang aman bagi lingkungan	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ● Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota ● Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ● Peningkatan IPLT ● Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja ● Pembangunan IPLT

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN 2025-2029, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.10
Isu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
-	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi	- Urbanisasi Dunia - Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan terhadap sumber air baku dan pelayanan air bersih yang aman dan layak untuk semua
	Pencapaian sanitasi aman dan sistem pengelolaan air limbah domestik masih perlu ditingkatkan					
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik masih perlu ditingkatkan	Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan				Masih kurangnya dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan ruang terbuka hijau (RTH)
Adanya program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal warga miskin	Masih tingginya angka backlog perumahan	Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	Demografi global	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Penurunan Angka Kemiskinan	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk peningkatan taraf hidup masyarakat
	Perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni masih perlu ditingkatkan					
	Belum optimalnya penataan Perumahan dan Kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan dan kenyamanan					Penyediaan sarana prasarana Permukiman yang Berkualitas
	Kuantitas dan kualitas					

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) lingkungan perlu ditingkatkan					
	Kualitas dan kuantitas PSU Perumahan perlu ditingkatkan					
	Belum optimalnya pengelolaan lahan pemakaman umum					
- Peningkatan nilai SAKIP Kota Semarang - Opini BPK terhadap hasil laporan keuangan daerah di Kota Semarang adalah WTP - Tingkat Maturitas SPIP di Kota Semarang terus meningkat - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Disperkim	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	- Perkembangan Teknologi - Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	-
	Belum optimalnya kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Disperkim					

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Keterangan:

1	Potensi kelebihan dari daerah
2	Permasalahan perangkat daerah yang terdapat di tabel 2.7
3	Isu KLHS yang terdapat di tabel 2.8
4	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang bersifat global yang relevan dengan urusan
5	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang level nasional yang relevan dengan urusan
6	Isu yang terdapat dokumen RPJMD Provinsi/Kab/Kota yang relevan dengan urusan
7	Hasil analisis isu strategis urusan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Semarang 2025-2029. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 tahun 2023.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang infrastruktur. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan : “Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana utilitas yang memadai”

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dengan indikator Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Disperkim dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau (sasaran kementerian)/ Menurunnya beban pengeluaran masyarakat	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana utilitas yang memadai		Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	95	80	60	40	20	0	Perbandingan Luas Kawasan Kumuh pada tahun berkenaan dengan sisa Kawasan Kumuh dari BA Kumuh pada tahun 2024 yaitu 44,58 Ha
		Meningkatnya Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	%	62,33	63,58	64,85	66,15	67,47	68,82	Perbandingan antara perumahan dan kawasan permukiman layak huni dengan Luas Kota Semarang
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Angka	80	80,5	81	81,5	82	82,5	Diambil dari hasil penilaian kinerja oleh APIP Kota Semarang
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Angka	89	89,2	89,5	89,7	90	90,2	Diambil dari aplikasi asikmas

Keterangan:

1	Sasaran dalam dokumen RPJMD yang dapat didukung oleh PD terkait
2	Tujuan PD minimal 1 kalimat tujuan
3	Sasaran Perangkat Daerah
4	Indikator tujuan maupun sasaran
5	Satuan dari indikator
6	Target indikator
7	Target indikator
8	Target indikator
9	Target indikator
10	Target indikator
11	Target indikator
12	Dapat diisi definisi operasional atau rumus indikator

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana utilitas yang memadai dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
- Sosialisasi, Survey SR dan Penyusunan DED Pembangunan IPAL/SPALDT - Peningkatan akses jalan lingkungan - FS, DED, LARAP, UKLUPL Makam Jabungan - DED, LARAP, UKLUPL Makam Rowosari - Apraisal, DED, LARAP, UKLUPL Makam Dadapan - Pembangunan Taman Sampangan (Karikatur) - Sosialisasi Program LLTT, FS IPLT Baru - Pembangunan Tangki Septic Skala Individu	- Sosialisasi, Survey SR dan Penyusunan DED dan Pembangunan SR IPAL/SPALDT - Peningkatan Akses Jalan Lingkungan - Peningkatan Kawasan Kauman - Appraisal dan Pengadaan Lahan Makam Jabungan - Pembangunan Makam Rowosari - Pengadaan Lahan Makam Dadapan - Pembangunan Makam Dadapan - FS Makam Palir - DED, LARAP, UKLUPL Makam Palir - Pengadaan Armada IPLT - Sosialisasi dan	- Sosialisasi, Survey SR dan Penyusunan DED dan Pembangunan SR - Peningkatan Akses Jalan Lingkungan - Appraisal dan Pengadaan Lahan Makam Palir - Pengadaan Armada IPLT - Sosialisasi dan Pelaksanaan Program LLTT - Pembangunan IPLT Baru - Monitoring dan Evaluasi sektor air bersih dan sanitasi - Pembangunan Tangki Septic Skala Individu - Rehabilitasi RTLH - Pembangunan	- Pembangunan SR IPAL/SPALDT - Peningkatan Akses Jalan Lingkungan - Pengadaan Armada IPLT - Sosialisasi dan Pelaksanaan Program LLTT - Pembangunan IPLT Baru - Monitoring dan Evaluasi sektor air bersih dan sanitasi - Pembangunan Tangki Septic Skala Individu - Rehabilitasi RTLH - Pembangunan Rumah Baru	- Pembangunan SR dan Operasional dan Pemeliharaan IPAL/SPALDT - Peningkatan Akses Jalan Lingkungan - Pembangunan Makam Jabungan - Pengadaan Armada IPLT - Sosialisasi dan Pelaksanaan Program LLTT - Monitoring dan Evaluasi sektor air bersih dan sanitasi - Pembangunan Tangki Septic Skala Individu - Rehabilitasi RTLH

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
- Revitalisasi IPLT Tanggung Rejo - Pengadaan Armada IPLT - Penyelidikan tanah IPLT Baru - LARAP IPLT Baru - Dokumen Lingkungan IPLT Baru - Monitoring dan Evaluasi sektor air bersih dan sanitasi - Raperwal Pembangunan Sarpras Sanitasi Individu - FS Rusun Pekerja Jerakah - DED Rusun Pekerja Jerakah - Rehabilitasi RTLH - Pembangunan Rumah Baru - Pembangunan Taman Halmahera (RBRA)	Pelaksanaan Program LLTT - Pembebasan Lahan IPLT Baru - Pembangunan IPLT Baru - Monitoring dan Evaluasi sektor air bersih dan sanitasi - Rehabilitasi RTLH - Pembangunan Sarpras Rusun Pekerja Jrakah - Pembangunan Sarpras Rusun Sawah Besar - Pembangunan Rumah Baru - Pembangunan Taman Citra Satwa (RBRA) - Pembangunan Taman Simongan - Pembangunan Taman Suratmo	Rumah Baru - Pembangunan Glamping Bumi Perkemahan Jatirejo - Pembangunan Taman Jatisari (RBRA)	- Pembangunan Instrumental Park - Pembangunan Taman Labirin	- Pembangunan Rumah Baru - Pembangunan Taman Beringin (biopori)

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat	Peningkatan akses air bersih dan sanitasi dasar di seluruh wilayah kota	Meningkatkan Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan	
			Mengoptimalkan pengelolaan limbah domestik dan sanitasi	
		Peningkatan program perumahan layak huni dan Penurunan permukiman kumuh	Meningkatkan jumlah rumah yang disediakan bagi warga terdampak bencana dan relokasi pemerintah	
			Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana/relokasi program pemerintah	
			Meningkatkan pengelolaan rumah susun	
			Mengoptimalkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni	
			Mengoptimalkan tindak lanjut kebijakan PKP	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Meningkatkan Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan yang terbangun	
			Mengoptimalkan penyelenggaraan PSU Perumahan	
		Peningkatan ruang terbuka hijau dan pelestarian kawasan lindung	Meningkatkan luasan RTH publik dalam bentuk Taman Kota terpelihara	
			Meningkatkan Jumlah Ketersediaan Lubang Makam	
2	Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	Mengoptimalkan penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Disperkim	
			Mengoptimalkan pengelolaan administrasi, penyusunan, dan pelaporan keuangan	
			Meningkatkan Kemampuan SDM Disperkim	
			Mengoptimalkan ketersediaan administrasi perkantoran Disperkim	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran Disperkim	
			Mengoptimalkan pengelolaan Pelaksanaan Jasa Penunjang Disperkim	
			Mengoptimalkan pemeliharaan aset Disperkim	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten/Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten/Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
Menurunnya beban pengeluaran masyarakat	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana utilitas yang memadai				Persentase Luas Kawasan Kumuh		Perbandingan Luas Kawasan Kumuh di tahun berkenaan dengan sisa Luas Kawasan Kumuh pada tahun 2024
		Meningkatnya Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni			Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni		Perbandingan perumahan dan permukiman yang layak huni di tahun berkenaan dengan seluruh perumahan dan kawasan permukiman
			Meningkatnya kualitas akses air minum aman		Persentase Rumah Tangga terlayani Air Minum aman (Dengan Satuan : Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perbandingan Rumah tangga terlayani Air Minum aman dengan Jumlah seluruh Rumah Tangga di Kota Semarang (Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Meningkatnya Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan	Persentase Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan (Dengan Satuan:%)	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perbandingan Rumah Tangga Perkotaan dengan air minum perpipaan dengan seluruh Rumah Tangga di Kota Semarang (Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	(SPAM) (Dengan Satuan:Orang)	Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1.03.03.2.01.0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
			Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman (Dengan Satuan:Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perbandingan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman dengan seluruh Rumah Tangga di Kota Semarang (Kepala Bidang Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum, Kepala UPTD PAL)
				Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perbandingan Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman dengan seluruh Rumah Tangga di Kota Semarang (Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Meningkatnya Pelayanan Penyedotan Tinja	Volume lumpur tinja yang diolah di IPLT		Kepala UPTD PAL
				Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Dengan Satuan:Unit)	1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	(Kepala UPTD PAL)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Dengan Satuan:Unit)	1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Dengan Satuan:Orang)	1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dengan satuan: Dokumen)	1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
			Meningkatnya upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun		Persentase backlog perumahan	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga yang sudah bertempat tinggal dengan seluruh Rumah Tangga di Kota Semarang (Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya rumah bagi warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	Jumlah Rumah yang disediakan bagi warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perbandingan Jumlah Rumah yang disediakan warga terdampak bencana dan relokasi pemerintah dengan seluruh Rumah yang terdampak bencana dan relokasi pemerintah (Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	(Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	(Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Terfasilitasinya kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana atau relokasi program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana atau relokasi program Kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (Dengan Satuan:Persentase)	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perbandingan Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) dengan seluruh warga negara korban bencana Kabupaten/Kota (Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	(Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Dengan Satuan:Kegiatan)	1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Meningkatnya pengelolaan rumah susun	Persentase rumah susun yang terkelola (Dengan Satuan:Persentase)		Perbandingan rumah susun yang terkelola dengan jumlah seluruh rumah susun di Kota Semarang (Kepala UPTD Rusun)
				Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	(Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Dengan Satuan : Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/ kota	(Kepala UPTD Rusun)
			Meningkatnya kawasan permukiman yang memenuhi standar		Persentase Kawasan yang Tertata (Dengan Satuan:Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbandingan Kawasan Permukiman Layak Huni dengan seluruh Kawasan Permukiman di Kota Semarang (Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan				
				Meningkatnya jumlah kebijakan bidang PKP yang ditindaklanjuti	Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang ditindaklanjuti (Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang sudah disusun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbandingan Kebijakan bidang PKP yang ditindaklanjuti dengan seluruh kebijakan bidang PKP (Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	(Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
			Meningkatnya rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan		Persentase Rumah Layak Huni (Dengan Satuan:Luas Kawasan)		Perbandingan Rumah Layak Huni dengan seluruh Rumah di Kota Semarang (Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, Kepala Bidang Permukiman)
				Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (Dengan Satuan:Persentase)	1.04.03.2.03 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbandingan Rumah Tidak Layak Huni di Tahun berkenaan dengan total seluruh Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang (Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, Kepala Bidang Permukiman)
				Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Persentase)		Perbandingan Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah diremajakan dengan seluruh kawasan permukiman kumuh di

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Kota Semarang (Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman)
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Ha)	1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	(Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman)
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian		persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah sarana prasarana linkungan dalam kondisi baik dengan seluruh sarana prasarana lingkungan di Kota Semarang (Kepala Bidang Permukiman, Kepala Bidang Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum, Kepala Bidang Pertamanan, Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman)
				Meningkatnya pembangunan sarana prasarana lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan yang terbangun (Dengan Satuan:Titik)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman)
				Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Dengan Satuan:Lokasi)	1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	(Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman)
				Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Dengan Satuan:Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	(Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Utilitas Umum Perumahan		untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Dengan Satuan:Persentase)		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU dengan seluruh perumahan di Kota Semarang (Kepala Bidang Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum)
				Meningkatnya jumlah perumahan yang telah dilengkapi PSU	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Dengan Satuan:Unit)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum)
				Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum)
			Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan		Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola (Dengan Satuan:Persentase)		Perbandingan luasan Ruang terbuka Hijau (Taman) yang terkelola dengan seluruh luasan Ruang terbuka Hijau (Taman) di Kota Semarang
				Meningkatnya kualitas pemeliharaan taman kota	Luasan Taman Kota terpelihara (Dengan Satuan:Meter Per-segi)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Ketua Tim Kerja Bidang Pertamanan)
				Tersusunnya pelaporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	(Ketua Tim Kerja Bidang Pertamanan)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Meningkatnya kualitas penyediaan pemakaman umum		Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk (Dengan Satuan:Persentase)		Perbandingan tempat pemakaman umum dengan 1000 penduduk (Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, Kepala UPTD Pemakaman)
				Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	Kegiatan perencanaan penyediaan PSU perumahan (Dengan Satuan: Kegiatan)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Terpenuhinya kebutuhan Pemakaman Umum	Jumlah Ketersediaan Lubang Makam (Dengan Satuan:Lubang)		(Kepala UPTD Pemakaman)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	(Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
				Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	(Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, Kepala UPTD Pemakaman)
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Perbandingan perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Disperkim yang berkualitas dengan seluruh perencanaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		keuangan Disperkim yang berkualitas	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	serta pelaporan kinerja dan keuangan Diseperkim (Sekretaris Dinas)
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Perbandingan kinerja pelayanan umum dan kepegawaian yang berkualitas dengan seluruh kinerja pelayanan umum dan kepegawaian (Sekretaris Dinas)
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang disusun tepat waktu	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perbandingan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Disperkim yang disusun tepat waktu dengan seluruh Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Disperkim (Ketua Tim Perencanaan)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Ketua Tim Perencanaan)
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Ketua Tim Perencanaan)
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Ketua Tim Perencanaan)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	(Ketua Tim Perencanaan)
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Ketua Tim Perencanaan)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Ketua Tim Perencanaan)
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Ketua Tim Perencanaan)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terselenggara ya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	(Ketua Tim Perencanaan)
				Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan dan pelaporan keuangan	Persentase tertib Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Persentase)	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perbandingan tertib Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Disperkim dengan seluruh Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Disperkim (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Meningkatnya kompetensi pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Persentase)	1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perbandingan Peningkatan Kemampuan SDM Disperkim dengan seluruh SDM di Disperkim Kota Semarang (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Persentase)	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perbandingan ketersediaan administrasi perkantoran Disperkim dengan kebutuhan administrasi perkantoran Disperkim Kota Semarang (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Persentase)	1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perbandingan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Disperkim dengan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Disperkim (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1.04.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah)
				Meningkatnya pelaksanaan jasa penunjang	Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang Terlaksana (Dengan Satuan:Persentase)	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perbandingan Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Disperkim yang Terlaksana dengan seluruh Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Disperkim (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terpeliharanya aset dinas	Persentase aset Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam kondisi baik	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Perbandingan aset Disperkim dalam kondisi baik dengan seluruh aset Disperkim (Kepala

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					(Dengan Satuan:Persentase)	Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
				Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik, Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih, Pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas akses air minum aman	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Meningkatnya kualitas akses air minum aman/Meningkatnya rumah tangga perkotaan dengan akses air minum perpipaan	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem	1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2	Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik, Pembangunan IPAL/SPALDT	Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman dan pengelolaan air limbah domestik	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sosialisasi, Survey SR dan Penyusunan DED SPALDT, Pembangunan SR SPALDT, Operasional dan Pemeliharaan SPALDT, Revitalisasi IPLT Tanggung Rejo, Pembangunan Tangki Septic Skala Individu
		Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
		Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.03.05.2.01.0042 Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
3	Pemenuhan rumah layak huni dan pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan, Penyediaan Rumah Bersubsidi	Meningkatnya upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pembangunan Sarpras Rusun Kota Semarang
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
		Meningkatnya pengelolaan rumah susun		
		Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
		Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
		Meningkatnya rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Meningkatnya kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
		Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		Meningkatnya penanganan kawasan kumuh		
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
5	Penambahan zona aktivitas gratis untuk masyarakat	Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Taman di Kota Semarang

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan/ Meningkatnya kualitas pemeliharaan taman kota	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
		Tersusunnya pelaporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
6	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah,Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya	Meningkatnya kualitas layanan penunjang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah/ Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.2.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				946.150.894,00		1.046.249.519,00		1.089.817.100,00		1.097.819.845,00		1.116.696.665,00	
Meningkatnya kualitas akses air minum aman	Persentase Rumah Tangga terlayani Air Minum aman (Dengan Satuan:Persentase)	44,13	48,65	946.150.894,00	51,08	1.046.249.519,00	53,65	1.089.817.100,00	56,33	1.097.819.845,00	59,15	1.116.696.665,00	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				946.150.894,00		1.046.249.519,00		1.089.817.100,00		1.097.819.845,00		1.116.696.665,00	
Meningkatnya Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan	Persentase Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan (Dengan Satuan:%)	58,12	60,47	946.150.894,00	61,68	1.046.249.519,00	62,91	1.089.817.100,00	64,17	1.097.819.845,00	65,45	1.116.696.665,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				475.440.824,00		525.740.383,00		547.633.092,00		551.654.472,00		561.140.074,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Bukan Jaringan Perpipaan													
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	3	1	475.440.824,00	1	525.740.383,00	1	547.633.092,00	1	551.654.472,00	1	561.140.074,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				87.518.957,00		96.778.080,00		100.808.081,00		101.548.335,00		103.294.441,00	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Dengan Satuan:Orang)	100	100	87.518.957,00	100	96.778.080,00	100	100.808.081,00	100	101.548.335,00	100	103.294.441,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				295.672.154,00		326.952.974,00		340.567.843,00		343.068.701,00		348.967.707,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	8	295.672.154,00	10	326.952.974,00	12	340.567.843,00	14	343.068.701,00	16	348.967.707,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.03.2.01.0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				87.518.959,00		96.778.082,00		100.808.084,00		101.548.337,00		103.294.443,00	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	96	96	87.518.959,00	96	96.778.082,00	96	100.808.084,00	96	101.548.337,00	96	103.294.443,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.648.769.176,00		1.823.201.741,00		1.899.122.913,00		1.913.068.553,00		1.945.963.431,00	
Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman (Dengan Satuan:Persentase)	3.19	3.32	1.648.769.176,00	3.39	1.823.201.741,00	3.45	1.899.122.913,00	3.52	1.913.068.553,00	3.59	1.945.963.431,00	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.599.306.101,52		1.823.201.741,82		1.899.122.913,26		1.913.068.553,06		1.945.963.431,62	
Meningkatnya Pelayanan Penyedotan Tinja	Persentase pengelolaan sistem air limbah domestik	100	100	1.599.306.101,52	100	1.823.201.741,82	100	1.899.122.913,26	100	1.913.068.553,06	100	1.945.963.431,62	Kepala UPTD PAL
Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman												Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				626.532.286,00		638.120.609,00		664.693.019,00		669.573.993,00		681.087.200,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	626.532.286,00	1	638.120.609,00	1	664.693.019,00	1	669.573.993,00	1	681.087.200,00	Kepala UPTD PAL
1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				362.729.218,00		346.408.330,00		360.833.353,00		363.483.025,00		369.733.051,00	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Dengan Satuan:Unit)	-	1	362.729.218,00	1	346.408.330,00	1	360.833.353,00	1	363.483.025,00	1	369.733.051,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				379.216.910,00		364.640.348,00		379.824.582,00		382.613.710,00		389.192.686,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	1	379.216.910,00	1	364.640.348,00	1	379.824.582,00	1	382.613.710,00	1	389.192.686,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				82.438.458,00		36.464.034,00		37.982.458,00		38.261.371,00		38.919.268,00	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Dengan Satuan:Orang)	100	100	82.438.458,00	100	36.464.034,00	100	37.982.458,00	100	38.261.371,00	100	38.919.268,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.05.2.01.0042 Perluasan Sistem Pengelolaan Air				0,00		273.480.261,00		284.868.436,00		286.960.282,00		291.894.514,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Limbah Domestik (SPALD) Terpusat													
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Dengan Satuan: Sambungan Rumah (SR)	-	-	0,00	2.500	273.480.261,00	5.000	284.868.436,00	7.500	286.960.282,00	10.000	291.894.514,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				197.852.304,00		164.088.159,00		170.921.065,00		172.176.172,00		175.136.712,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dengan satuan: Dokumen)	-	1	197.852.304,00	1	164.088.159,00	1	170.921.065,00	1	172.176.172,00	1	175.136.712,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				6.599.943.901		7.298.189.091		7.602.097.899		7.657.921.628		7.789.598.245	
Meningkatnya upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun	Persentase backlog perumahan	24,11	24,119	6.599.943.901	24,122	7.298.189.091	24,125	7.602.097.899	24,13	7.657.921.628	24,133	7.789.598.245	Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				395.996.634,06		437.891.345,46		456.125.873,94		459.475.297,68		467.375.894,70	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya rumah bagi warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	Jumlah Rumah yang disediakan bagi warga terdampak bencana dan relokasi pemerintah	3	3	395.996.634,06	3	437.891.345,46	3	456.125.873,94	3	459.475.297,68	3	467.375.894,70	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				131.998.878,02		145.963.781,82		152.041.957,98		153.158.432,56		155.791.964,90	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	131.998.878,02	1	145.963.781,82	1	152.041.957,98	1	153.158.432,56	1	155.791.964,90	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				131.998.878,02		145.963.781,82		152.041.957,98		153.158.432,56		155.791.964,90	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	131.998.878,02	1	145.963.781,82	1	152.041.957,98	1	153.158.432,56	1	155.791.964,90	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				131.998.878,02		145.963.781,82		152.041.957,98		153.158.432,56		155.791.964,90	
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	131.998.878,02	1	145.963.781,82	1	152.041.957,98	1	153.158.432,56	1	155.791.964,90	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				395.996.634,06		437.891.345,46		456.125.873,94		459.475.297,68		467.375.894,70	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terfasilitasinya kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana atau relokasi program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	395.996.634,06	100	437.891.345,46	100	456.125.873,94	100	459.475.297,68	100	467.375.894,70	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				395.996.634,06		437.891.345,46		456.125.873,94		459.475.297,68		467.375.894,70	
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	24	15	395.996.634,06	15	437.891.345,46	15	456.125.873,94	15	459.475.297,68	15	467.375.894,70	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				5.807.950.632,88		6.422.406.400,08		6.689.846.151,12		6.738.971.032,64		6.854.846.455,60	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	1	1.385.988.219,21	1	1.532.619.709,11	1	1.596.440.558,79	1	1.608.163.541,88	1	1.635.815.631,45	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
Meningkatnya pengelolaan rumah susun	Persentase rumah susun yang terkelola (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	4.421.962.413,67	100	4.889.786.690,97	100	5.093.405.592,33	100	5.130.807.490,76	100	5.219.030.824,15	Kepala UPTD Rusun
1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1.385.988.219,21		1.532.619.709,11		1.596.440.558,79		1.608.163.541,88		1.635.815.631,45	
Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.385.988.219,21	1	1.532.619.709,11	1	1.596.440.558,79	1	1.608.163.541,88	1	1.635.815.631,45	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/ kota				4.421.962.413,67		4.889.786.690,97		5.093.405.592,33		5.130.807.490,76		5.219.030.824,15	
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Dengan Satuan : Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	48	48	4.421.962.413,67	48	4.889.786.690,97	48	5.093.405.592,33	48	5.130.807.490,76	48	5.219.030.824,15	Kepala UPTD Rusun
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
Meningkatnya rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Rumah Layak Huni (Dengan Satuan:Luas Kawasan)	94.63	95.09	16.549.641.891,00	95.32	18.300.521.598,00	95.55	19.062.585.945,00	95.78	19.202.566.337,00	96.01	19.532.751.092,00	Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Kawasan yang Tertata (Dengan Satuan:Persentase)	81,22	10	871.033.784,00	30	963.185.348,00	50	1.003.293.998,00	70	1.010.661.387,00	100	1.028.039.532,00	Kepala Bidang Permukiman
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				871.033.784,00		963.185.348,00		1.003.293.998,00		1.010.661.387,00		1.028.039.532,00	
Meningkatnya jumlah kebijakan bidang PKP yang ditindaklanjuti	Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang ditindaklanjuti (Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang sudah disusun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	1	871.033.784,00	1	963.185.348,00	1	1.003.293.998,00	1	1.010.661.387,00	1	1.028.039.532,00	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				871.033.784,00		963.185.348,00		1.003.293.998,00		1.010.661.387,00		1.028.039.532,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersusun/Tereview/ Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	871.033.784,00	1	963.185.348,00	1	1.003.293.998,00	1	1.010.661.387,00	1	1.028.039.532,00	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				16.549.641.891,00		18.300.521.598,00		19.062.585.945,00		19.202.566.337,00		19.532.751.092,00	
Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (Dengan Satuan:Persentase)	1.691	100	14.596.534.930,00	100	16.140.784.466,00	100	16.812.913.744,00	100	16.936.374.342,00	100	17.227.592.324,00	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Persentase)	93,95	100	1.953.106.961,00	100	2.159.737.132,00	100	2.249.672.201,00	100	2.266.191.995,00	100	2.305.158.768,00	Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				14.596.534.930,00		16.140.784.466,00		16.812.913.744,00		16.936.374.342,00		17.227.592.324,00	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	1.691	1.000	14.596.534.930,00	1.000	16.140.784.466,00	1.000	16.812.913.744,00	1.000	16.936.374.342,00	1000	17.227.592.324,00	Ketua Tim Kerja Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman
1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				1.953.106.961,00		2.159.737.132,00		2.249.672.201,00		2.266.191.995,00		2.305.158.768,00	
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Ha)	93,95	25	1.953.106.961,00	25	2.159.737.132,00	25	2.249.672.201,00	25	2.266.191.995,00	25	2.305.158.768,00	Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian	persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	60.82	68	222.681.207.707,00	72	256.194.035.582,00	76	270.780.378.188,00	80	273.459.682.058,00	84	279.779.605.017,00	Kepala Bidang Permukiman
Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Dengan Satuan:Persentase)	22.75	27.75	13.755.943.150,00	30.25	15.826.169.729,00	32.75	16.727.228.700,00	35.25	16.892.740.429,00	37.75	17.283.148.321,00	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Umum
Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	29.602.789.658,00	100	34.057.917.258,00	100	35.996.996.161,00	100	36.353.177.402,00	100	37.193.335.186,00	Kepala Bidang Pertamanan
Meningkatnya kualitas penyediaan pemakaman umum	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk (Dengan Satuan:Persentase)	14	15	9.078.922.479,00	15	10.445.272.022,00	15	11.039.970.942,00	15	11.149.208.683,00	15	11.406.877.892,00	Kepala UPTD Pemakaman
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				222.681.207.707,00		256.194.035.582,00		270.780.378.188,00		273.459.682.058,00		279.779.605.017,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya pembangunan sarana prasarana lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan yang terbangun (Dengan Satuan:Titik)	1.301	850	222.681.207.707,00	850	256.194.035.582,00	850	270.780.378.188,00	850	273.459.682.058,00	850.00	279.779.605.017,00	Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman
1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				93.375.342.100,00		107.428.040.124,00		113.544.428.412,00		114.667.922.029,00		117.318.010.801,00	
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Dengan Satuan:Lokasi)	530	1.000	93.375.342.100,00	1.000	107.428.040.124,00	1.000	113.544.428.412,00	1.000	114.667.922.029,00	1.000	117.318.010.801,00	Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman
1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				129.305.865.607,00		148.765.995.458,00		157.235.949.776,00		158.791.760.029,00		162.461.594.216,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Dengan Satuan:Lokasi)	771	700	129.305.865.607,00	700	148.765.995.458,00	700	157.235.949.776,00	700	158.791.760.029,00	700	162.461.594.216,00	Ketua Tim Kerja Bidang Permukiman
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				13.755.943.150,00		15.826.169.729,00		16.727.228.700,00		16.892.740.429,00		17.283.148.321,00	
Meningkatnya jumlah perumahan yang telah dilengkapi PSU	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Dengan Satuan:Unit)	91	111	13.755.943.150,00	121	15.826.169.729,00	131	16.727.228.700,00	10	16.892.740.429,00	10	17.283.148.321,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				13.755.943.150,00		15.826.169.729,00		16.727.228.700,00		16.892.740.429,00		17.283.148.321,00	
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Dengan Satuan:Laporan)	17	10	13.755.943.150,00	10	15.826.169.729,00	10	16.727.228.700,00	10	16.892.740.429,00	10	17.283.148.321,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				29.602.789.658,00		34.057.917.258,00		35.996.996.161,00		36.353.177.402,00		37.193.335.186,00	
Meningkatnya kualitas pemeliharaan taman kota	Luasan Taman Kota terpelihara (Dengan Satuan: Meter Persegi)	353,03	353,03	29.602.789.658,00	353,03	34.057.917.258,00	353,03	35.996.996.161,00	353,03	36.353.177.402,00	353,03	37.193.335.186,00	Ketua Tim Kerja Bidang Pertamanan
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				29.602.789.658,00		34.057.917.258,00		35.996.996.161,00		36.353.177.402,00		37.193.335.186,00	
Tersusunnya pelaporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	29.602.789.658,00	1	34.057.917.258,00	1	35.996.996.161,00	1	36.353.177.402,00	1	37.193.335.186,00	Ketua Tim Kerja Bidang Pertamanan
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				9.078.922.479,00		10.445.272.022,00		11.039.970.942,00		11.149.208.683,00		11.406.877.892,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	Kegiatan perencanaan penyediaan PSU perumahan (Dengan Satuan: Kegiatan)	1	1	3.576.545.219,00	1	4.114.804.130,00	1	4.349.079.462,00	1	4.392.112.512,00	1	4.493.618.564,00	Ketua Tim Kerja
Terpenuhinya kebutuhan Pemakaman Umum	Jumlah Ketersediaan Lubang Makam (Dengan Satuan:Lubang)	14	14	5.502.377.260,00	14	6.330.467.892,00	14	6.690.891.480,00	14	6.757.096.171,00	14	6.913.259.328,00	Kepala UPTD Pemakaman
1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				3.576.545.219,00		4.114.804.130,00		4.349.079.462,00		4.392.112.512,00		4.493.618.564,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3.576.545.219,00	1	4.114.804.130,00	1	4.349.079.462,00	1	4.392.112.512,00	1	4.493.618.564,00	Ketua Tim Kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				5.502.377.260,00		6.330.467.892,00		6.690.891.480,00		6.757.096.171,00		6.913.259.328,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	14	14	5.502.377.260,00	14	6.330.467.892,00	14	6.690.891.480,00	14	6.757.096.171,00	14	6.913.259.328,00	Kepala UPTD Pemakaman
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Disperkim yang berkualitas	100%	100%	30.838.197.100,00	100%	32.443.337.904,00	100%	34.054.682.320,00	100%	35.701.143.029,00	100%	37.442.440.942,00	Sekretaris Dinas
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Disperkim	79	80	16.936.134.118,00	85	20.745.618.366,00	87	21.490.970.806,00	89	20.277.401.822,00	90	19.557.205.837,00	Sekretaris Dinas
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				238.871.656,00		265.944.781,00		277.728.266,00		279.892.724,00		284.998.234,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Disperkim yang disusun tepat waktu	100%	100%	238.871.656,00	100%	265.944.781,00	100%	277.728.266,00	100%	279.892.724,00	100%	284.998.234,00	Ketua Tim Perencanaan
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				81.214.817,00		92.856.260,00		97.923.158,00		98.853.875,00		101.049.243,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	4	4	81.214.817,00	4	92.856.260,00	4	97.923.158,00	4	98.853.875,00	4	101.049.243,00	Ketua Tim Perencanaan
1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				13.221.015,00		15.116.134,00		15.940.978,00		16.092.490,00		16.449.876,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	13.221.015,00	1	15.116.134,00	1	15.940.978,00	1	16.092.490,00	1	16.449.876,00	Ketua Tim Perencanaan
1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				13.221.015,00		15.116.134,00		15.940.978,00		16.092.490,00		16.449.876,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	13.221.015,00	1	15.116.134,00	1	15.940.978,00	1	16.092.490,00	1	16.449.876,00	Ketua Tim Perencanaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				22.664.598,00		25.913.373,00		27.327.391,00		27.587.126,00		28.199.788,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	22.664.598,00	1	25.913.373,00	1	27.327.391,00	1	27.587.126,00	1	28.199.788,00	Ketua Tim Perencanaan
1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				13.221.015,00		15.116.134,00		15.940.978,00		16.092.490,00		16.449.876,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	13.221.015,00	1	15.116.134,00	1	15.940.978,00	1	16.092.490,00	1	16.449.876,00	Ketua Tim Perencanaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13.221.015,00		15.116.134,00		15.940.978,00		16.092.490,00		16.449.876,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	13.221.015,00	1	15.116.134,00	1	15.940.978,00	1	16.092.490,00	1	16.449.876,00	Ketua Tim Perencanaan
1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.108.181,00		36.710.612,00		38.713.805,00		39.081.763,00		39.949.699,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	32.108.181,00	2	36.710.612,00	2	38.713.805,00	2	39.081.763,00	2	39.949.699,00	Ketua Tim Perencanaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terselenggara ya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Ketua Tim Perencanaan
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				30.599.325.444,00		32.177.393.123,00		33.776.954.054,00		35.421.250.305,00		37.157.442.708,00	
Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan dan pelaporan keuangan	Persentase tertib Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Disperkim (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	30.599.325.444,00	100%	32.177.393.123,00	100%	33.776.954.054,00	100%	35.421.250.305,00	100%	37.157.442.708,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.847.877.931,00		31.332.681.828,00		32.891.650.019,00		34.528.489.960,00		36.247.094.475,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	156	269	29.847.877.931,00	269	31.332.681.828,00	269	32.891.650.019,00	269	34.528.489.960,00	269	36.247.094.475,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				734.581.316,00		825.751.798,00		865.433.436,00		872.722.389,00		889.915.519,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10	734.581.316,00	10	825.751.798,00	10	865.433.436,00	10	872.722.389,00	10	889.915.519,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.655.809,00		4.109.539,00		4.307.024,00		4.343.299,00		4.428.864,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1.200	3.655.809,00	1.200	4.109.539,00	1.200	4.307.024,00	1.200	4.343.299,00	1.200	4.428.864,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.326.188,00		4.863.121,00		5.096.819,00		5.139.746,00		5.241.002,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.326.188,00	1	4.863.121,00	1	5.096.819,00	1	5.139.746,00	1	5.241.002,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.558.012,00		5.123.716,00		5.369.937,00		5.415.165,00		5.521.846,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	18	18	4.558.012,00	18	5.123.716,00	18	5.369.937,00	18	5.415.165,00	18	5.521.846,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4.326.188,00		4.863.121,00		5.096.819,00		5.139.746,00		5.241.002,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	2	6	4.326.188,00	6	4.863.121,00	6	5.096.819,00	6	5.139.746,00	6	5.241.002,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				587.298.178,00		642.527.354,00		666.565.662,00		670.981.157,00		681.396.397,00	
Meningkatnya kompetensi pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Disperkim (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	587.298.178,00	100%	642.527.354,00	100%	666.565.662,00	100%	670.981.157,00	100%	681.396.397,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				122.708.555,00		136.616.040,00		142.669.225,00		143.781.109,00		146.403.813,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	2	400	122.708.555,00	400	136.616.040,00	400	142.669.225,00	400	143.781.109,00	400	146.403.813,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				7.614.293,00		8.477.278,00		8.852.889,00		8.921.883,00		9.084.627,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	12	1	7.614.293,00	1	8.477.278,00	1	8.852.889,00	1	8.921.883,00	1	9.084.627,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				325.836.635,00		362.766.157,00		378.839.604,00		381.792.067,00		388.756.318,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	60	50	325.836.635,00	50	362.766.157,00	50	378.839.604,00	50	381.792.067,00	50	388.756.318,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				31.138.695,00		34.667.879,00		36.203.944,00		36.486.098,00		37.151.639,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	20	50	31.138.695,00	50	34.667.879,00	50	36.203.944,00	50	36.486.098,00	50	37.151.639,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				725.465.036,00		785.019.949,00		810.941.019,00		815.702.351,00		826.933.348,00	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran Disperkim (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	725.465.036,00	100	785.019.949,00	100	810.941.019,00	100	815.702.351,00	100	826.933.348,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.325.821,00		44.896.249,00		46.885.512,00		47.250.912,00		48.112.814,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	10	40.325.821,00	10	44.896.249,00	10	46.885.512,00	10	47.250.912,00	10	48.112.814,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				200.324.090,00		223.028.329,00		232.910.271,00		234.725.443,00		239.007.059,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	20	25	200.324.090,00	25	223.028.329,00	25	232.910.271,00	25	234.725.443,00	25	239.007.059,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				76.145.105,00		84.775.204,00		88.531.425,00		89.221.390,00		90.848.872,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	30	25	76.145.105,00	25	84.775.204,00	25	88.531.425,00	25	89.221.390,00	25	90.848.872,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				78.713.044,00		87.634.187,00		91.517.083,00		92.230.316,00		93.912.685,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	10	78.713.044,00	10	87.634.187,00	10	91.517.083,00	10	92.230.316,00	10	93.912.685,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.067.870,00		29.022.338,00		30.308.260,00		30.544.465,00		31.101.625,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	1	26.067.870,00	1	29.022.338,00	1	30.308.260,00	1	30.544.465,00	1	31.101.625,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89.383.202,00		99.513.674,00		103.922.927,00		104.732.844,00		106.643.271,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	1	89.383.202,00	1	99.513.674,00	1	103.922.927,00	1	104.732.844,00	1	106.643.271,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				14.505.904,00		16.149.968,00		16.865.541,00		16.996.981,00		17.307.022,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	14.505.904,00	1	16.149.968,00	1	16.865.541,00	1	16.996.981,00	1	17.307.022,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.047.746.184,00		5.283.154.744,00		5.343.396.178,00		4.003.982.036,00		2.986.943.389,00	
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Disperkim (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	3.047.746.184,00	100%	5.283.154.744,00	100%	5.343.396.178,00	100%	4.003.982.036,00	100%	2.986.943.389,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				331.730.799,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		335.642.218,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	10	331.730.799,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	335.642.218,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar				2.000.000.000,00		4.008.655.446,00		4.043.441.959,00		2.699.352.110,00		2.000.000.000,00	
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	7	7	2.000.000.000,00	7	4.008.655.446,00	7	4.043.441.959,00	7	2.699.352.110,00	7	2.000.000.000,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		35.642.219,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	100	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	35.642.219,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				516.015.385,00		574.499.298,00		599.954.219,00		604.629.926,00		615.658.952,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40	25	516.015.385,00	25	574.499.298,00	25	599.954.219,00	25	604.629.926,00	25	615.658.952,00	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.787.202.444,00		1.989.759.568,00		2.077.921.857,00		2.094.116.017,00		2.132.314.686,00	
Meningkatnya pelaksanaan jasa penunjang	Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Disperkim yang Terlaksana (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	1.787.202.444,00	100	1.989.759.568,00	100	2.077.921.857,00	100	2.094.116.017,00	100	2.132.314.686,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.460.723,00		17.213.003,00		17.975.677,00		18.115.770,00		18.446.219,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	15.460.723,00	12	17.213.003,00	12	17.975.677,00	12	18.115.770,00	12	18.446.219,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				817.449.455,00		910.097.164,00		950.421.759,00		957.828.814,00		975.300.523,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	817.449.455,00	12	910.097.164,00	12	950.421.759,00	12	957.828.814,00	12	975.300.523,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				954.292.266,00		1.062.449.401,00		1.109.524.421,00		1.118.171.433,00		1.138.567.944,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	954.292.266,00	12	1.062.449.401,00	12	1.109.524.421,00	12	1.118.171.433,00	12	1.138.567.944,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.788.422.276,00		12.045.156.751,00		12.592.146.090,00		12.692.620.261,00		12.929.618.017,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terpeliharanya aset dinas	Persentase aset Disperkim dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	10.788.422.276,00	100	12.045.156.751,00	100	12.592.146.090,00	100	12.692.620.261,00	100	12.929.618.017,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.288.634.533,00		1.468.686.459,00		1.547.053.438,00		1.561.448.339,00		1.595.402.928,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	270	270	1.288.634.533,00	270	1.468.686.459,00	270	1.547.053.438,00	270	1.561.448.339,00	270	1.595.402.928,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.872.032.819,00		8.764.229.633,00		9.152.555.215,00		9.223.885.107,00		9.392.137.549,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	110	110	7.872.032.819,00	110	8.764.229.633,00	110	9.152.555.215,00	110	9.223.885.107,00	110	9.392.137.549,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel				38.221.111,00		42.552.998,00		44.438.437,00		44.784.765,00		45.601.682,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	614	614	38.221.111,00	614	42.552.998,00	614	44.438.437,00	614	44.784.765,00	614	45.601.682,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				435.478.363,00		484.834.409,00		506.316.457,00		510.262.404,00		519.570.076,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	300	300	435.478.363,00	300	484.834.409,00	300	506.316.457,00	300	510.262.404,00	300	519.570.076,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.154.055.450,00		1.284.853.252,00		1.341.782.543,00		1.352.239.646,00		1.376.905.782,00	
Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	5	5	1.154.055.450,00	5	1.284.853.252,00	5	1.341.782.543,00	5	1.352.239.646,00	5	1.376.905.782,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber: DISPERKIM Kota Semarang

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	95	80	60	40	20	0	Indikator Tujuan
2	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	%	62.33	63.58	64.85	66.15	67.47	68.82	Indikator Sasaran

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Kabupaten/Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 4 jiwa)	%	100	100	100	100	100	100	Indikator Kinerja Kunci
2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	Indikator Kinerja Kunci
3	Persentase areal kawasan kumuh	%	95	80	60	40	20	0	Indikator Kinerja Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	Indikator Kinerja Kunci
3	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	95	10	30	50	70	100	Indikator Kinerja Daerah
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1749	1769	1789	1809	1829	1849	Indikator Kinerja Daerah
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	25,25	27,75	30,25	32,75	35,25	37,75	Indikator Kinerja Daerah
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	40	40	40	40	40	40	Indikator Kinerja Daerah
7	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,84	98,9	98,96	99,01	99,07	99,13	Indikator Utama Pembangunan
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,8	16,91	21,02	25,13	29,24	33,35	Indikator Kinerja Daerah
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	56,05	58,25	60,45	62,64	64,84	67,04	Indikator Kinerja Daerah

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, seta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Permasalahan penanganan permukiman kumuh, penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman, serta kebutuhan akan ruang terbuka hijau sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, seta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

7. SATPOL PP

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota No. 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang Ketentraman dan ketertiban Umum , agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 98).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Ketentraman dan Ketertiban Umun yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

(a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
(b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
(c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
(d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kota Semarang berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang penyusunan Struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi Satpol PP serta pedoman-pedoman dasar lainnya. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Di dalam regulasi tersebut, kedudukan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam tatanan pemerintahan daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam tatanan pemerintahan daerah Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas membantu Walikota melaksanakaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, dan UPT;

4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Satpol PP;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, dan UPT;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan UPT;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan UPT;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Untuk memastikan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja telah disusun secara struktural sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Komposisi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

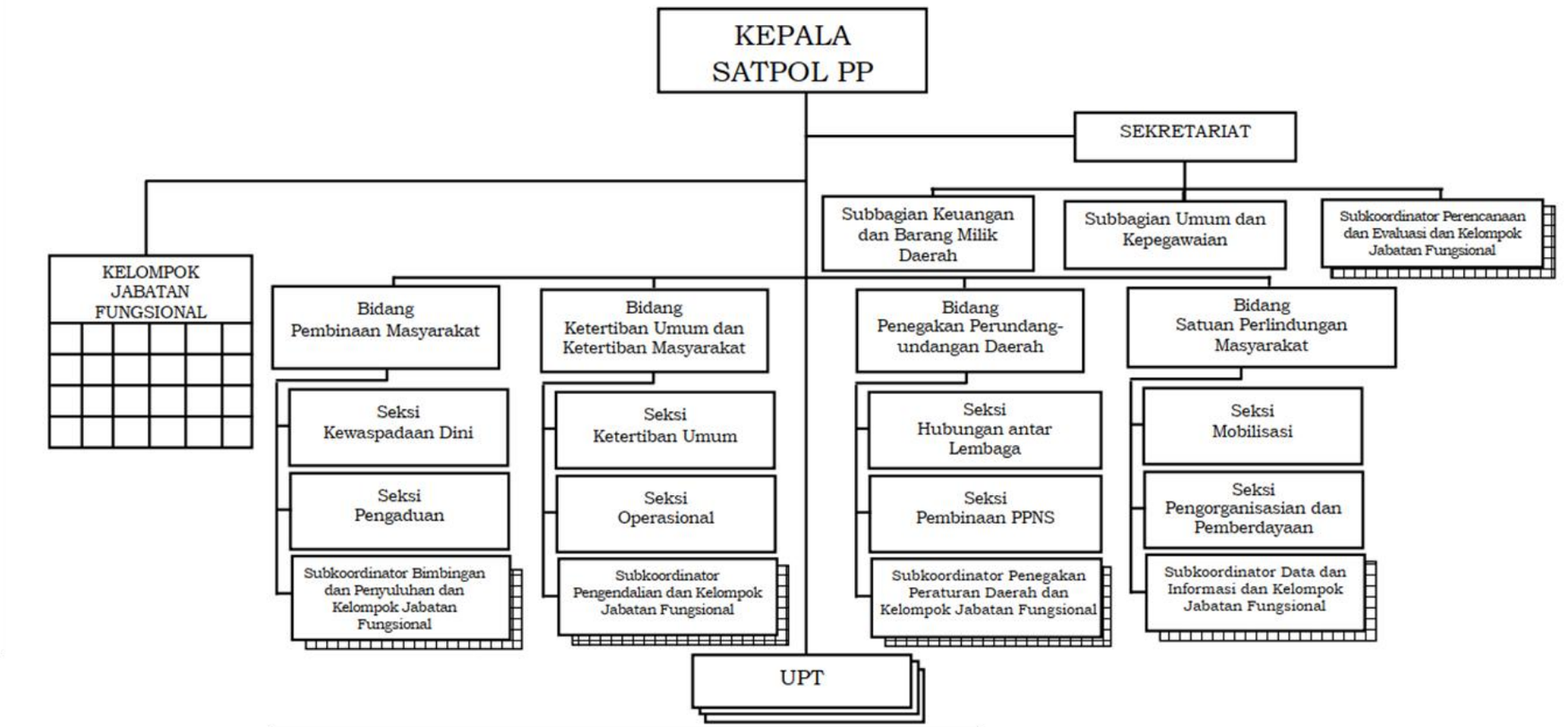

d. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Satpol PP Kota Semarang

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Komposisi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**
   Kepala Satpol PP mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
2. **Sekretariat**
   Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, dan UPT. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris memiliki tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

   Dalam menjalankan tugasnya seperti pada penjelasan di atas, sekretariat memiliki fungsi:
   a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
   b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
   c. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, dan UPT.
   d. Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, dan UPT.
   e. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait.
   f. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Satpol PP.
   g. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Satpol PP.
   h. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP.
   i. Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Satpol PP.
   j. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan. Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerahdan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP.
   k. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP.

l. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Satpol PP.
m. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Satpol PP.
n. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan.
o. Pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Satpol PP.
p. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Satpol PP.
q. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Satpol PP.
r. Pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Satpol PP.
s. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Satpol PP.
t. Pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Satpol PP.
u. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Satpol PP.
v. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Satpol PP.
w. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Satpol PP.
x. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Satpol PP.
y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan.
z. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang terdiri 2 subbagian dan 1 subkoordinator yakni Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi. Masing-masing tugas Subbagian dan Subkoordinator Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut:

a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian ini memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.

4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
5) Menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP.
6) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP.
7) Menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Satpol PP.
8) Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Satpol PP.
9) Menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan.
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Satpol PP.
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
12) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian ini memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5) Menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Satpol PP.
6) Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Satpol PP.
7) Menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Satpol PP.
8) Menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Satpol PP.
9) Menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Satpol PP.
10) Menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Satpol PP.
11) Menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Satpol PP.

12) Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Satpol PP.
13) Menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Satpol PP.
14) Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Satpol PP.
15) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
16) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
17) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi

Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan perencanaan dan evaluasi. Subkoordinator ini memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi.
5) Menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Satpol PP.
6) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satpol PP.
7) Menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Satpol PP.
8) Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP.
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi.
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi.
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi.
12) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pembinaan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Kewaspadaan Dini, Pengaduan, serta Bimbingan dan
Penyuluhan. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat juga memiliki tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk dapat mewujudkan tugas sebagaimana mestinya, Bidang Pembinaan Masyarakat ini memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
2) Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat.
5) Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengumpulan informasi objek pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
6) Pelaksanaan kegiatan analisa dan pengolahan data dan informasi atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
7) Pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
8) Pelaksanaan kegiatan deteksi dini dan cegah dini adanya kerawanan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
9) Pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
10) Pelaksanaan kegiatan pemberian tanggapan dan jawaban laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
11) Pelaksanaan kegiatan distribusi penanganan laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
12) Pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan tindak lanjut laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
13) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
14) Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan bagi pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
15) Pelaksanaan kegiatan pembuatan dan pemasangan tanda larangan atau peringatan.
16) Pelaksanaan kegiatan distribusi dan penghapusan barang hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

17) Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat.
18) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pembinaan Masyarakat.
19) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan.
20) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Masyarakatterdiri atas 2 seksi dan 1 subkoordinator yakni Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Pengaduan dan Subkoordinator Bimbingan dan Penyuluhan. Masing-masing tugas seksi dan subkoordinator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Seksi Kewaspadaan Dini

Seksi Kewaspadaan Dini memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Kewaspadaan Dini.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kewaspadaan Dini.
5) Menyiapkan kegiatan pendataan dan pengumpulan informasi objek pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah
6) Menyiapkan kegiatan analisa dan pengolahan data dan informasi atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
7) Menyiapkan kegiatan pemetaan wilayah rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
8) Menyiapkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini adanya kerawanan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kewaspadaan Dini.
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kewaspadaan Dini.
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengaduan

Seksi Pengaduaan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pengaduan.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengaduan.

5) Menyiapkan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
6) Menyiapkan kegiatan pemberian tanggapan dan jawaban laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
7) Menyiapkan kegiatan distribusi penanganan laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
8) Menyiapkan kegiatan monitoring pelaksanaan tindak lanjut laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengaduan.
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengaduan.
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Bimbingan dan Penyuluhan

Subkoordinator Bimbingan dan Penyuluhan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bimbingan dan Penyuluhan
2) Mmenyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Bimbingan dan Penyuluhan.
5) Menyiapkan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
6) Menyiapkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan bagi pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
7) Menyiapkan kegiatan pembuatan dan pemasangan tanda larangan atau peringatan.
8) Menyiapkan kegiatan distribusi dan penghapusan barang hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Bimbingan dan Penyuluhan.
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Bimbingan dan Penyuluhan.
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan.
12) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Ketertiban Umum, Operasional, dan Pengendalian, serta memiliki tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk dapat mewujudkan tugas sebagaimana mestinya, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
e. Pelaksanaan kegiatan pengawalan Walikota dan Wakil Walikota serta tamu penting.
f. Pelaksanaan kegiatan pengamanan tempat penting, rumah dinas pejabat pemerintahan daerah serta barang milik daerah.
g. Pelaksanaan kegiatan pengamanan acara-acara resmi, kegiatan dalam rangka hari besar nasional atau keagamaan.
h. Pelaksanaan kegiatan patroli terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
i. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan patroli pariwisata.
j. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa.
k. Pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
l. Pelaksanaan kegiatan pemberian peringatan dan teguran tertulis kepada pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
m. Pelaksanaan kegiatan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
n. Pelaksanaan kegiatan penyitaan dan penyimpanan barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
o. Pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
p. Pelaksanaan kegiatan non yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat.
q. Pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
r. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan disiplin, anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
s. Pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat pada masa pembinaan.

t. Pelaksanaan kegiatan penerbitan rehabilitasi anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
u. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
v. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
w. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan.
x. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dasi 2 seksi dan 1 subkoordinator yakni Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional dan Subkoordinator Pengendalian. Masing-masing tugas seksi dan subkoordinator Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dijabarkan sebagai berikut:

a. Seksi Ketertiban

Seksi Ketertiban memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Ketertiban Umum.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketertiban Umum.
5) Menyiapkan kegiatan pengawalan Walikota dan Wakil Walikota serta tamu penting.
6) Menyiapkan kegiatan pengamanan tempat penting, rumah dinas pejabat pemerintahan daerah serta barang milik daerah.
7) Menyiapkan kegiatan pengamanan acara-acara resmi, kegiatan dalam rangka hari besar nasional atau keagamaan.
8) Menyiapkan kegiatan patroli terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9) Menyiapkan kegiatan pengamanan dan patroli pariwisata.
10) Menyiapkan kegiatan fasilitasi penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa.
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketertiban Umum.
12) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketertiban Umum.
13) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum.
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Operasional

Seksi Operasional memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Operasional.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.

3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Operasional.
5) Menyiapkan kegiatan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
6) Menyiapkan kegiatan pemberian peringatan dan teguran tertulis kepada pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
7) Menyiapkan kegiatan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
8) Menyiapkan kegiatan penyitaan dan penyimpanan barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
9) Menyiapkan kegiatan pengamanan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
10) Menyiapkan kegiatan non yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat.
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Operasional.
12) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Operasional.
13) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional.
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Pengendalian

Subkoordinator Pengendalian memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengendalian.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengendalian.
5) Menyiapkan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
6) Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pembinaan disiplin, anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
7) Menyiapkan kegiatan monitoring terhadap anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat pada masa pembinaan.
8) Menyiapkan kegiatan penerbitan rehabilitasi anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengendalian.
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengendalian.

11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengendalian.
12) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. epala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Hubungan Antar Lembaga, Penegakan Peraturan Daerah, dan Pembinaan PPNS, serta memiliki tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk dapat mewujudkan tugas sebagaimana mestinya, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah.
e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan identifikasi dan potensi hubungan antar lembaga penegak hukum, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
f. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
g. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber daya Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat.
h. Pelaksanaan kegiatan upacara, gelar pasukan, pengiriman lomba, jambore dan sejenisnya baik tingkat kota, provinsi maupun pusat.
i. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
j. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.
k. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan PPNS.
l. Pelaksanaan kegiatan pembinaan PPNS.
m. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis PPNS dan Penegakan Peraturan Daerah.
n. Pelaksanaan kegiatan yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat.
o. Pelaksanaan kegiatan tindakan pertama yustisial di tempat kejadian.
p. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penyitaan barang dan surat.
q. Pelaksanaan kegiatan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
r. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
s. Pelaksanaan kegiatan penyusunan berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

t. Pelaksanaan kegiatan penanganan tindak pidana ringan dan sidang ditempat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
u. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
v. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
w. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan.
x. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri atas 2 seksi dan 1 subkoordinator yakni Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Pembinaan PPNS. dan Subkoordinator Penegakan Peraturan Daerah. Masing-masing tugas seksi dan subkoordinator Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dijabarkan sebagai berikut:

a. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Hubungan Antar Lembaga.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Hubungan Antar Lembaga.
5) Menyiapkan kegiatan penyusunan identifikasi dan potensi hubungan antar lembaga penegak hukum, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
6) Menyiapkan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
7) Menyiapkan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber daya Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat.
8) Menyiapkan kegiatan upacara, gelar pasukan, pengiriman lomba, jambore dan sejenisnya baik tingkat kota, provinsi maupun pusat.
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Hubungan Antar Lembaga.
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Hubungan Antar Lembaga.
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pembinaan PPNS

Seksi Pembinaan PPNS memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pembinaan PPNS.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.

3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembinaan PPNS;
5) Menyiapkan kegiatan pemberdayaan PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
6) Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.
7) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebutuhan PPNS.
8) Menyiapkan kegiatan pembinaan PPNS.
9) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis PPNS dan Penegakan Peraturan Daerah.
10) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembinaan PPNS.
11) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembinaan PPNS.
12) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan PPNS.
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Penegakan Peraturan Daerah

Subkoordinator Penegakan Peraturan Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penegakan Peraturan Daerah.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Mmenyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah.
5) Menyiapkan kegiatan yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat.
6) Menyiapkan kegiatan tindakan pertama yustisial di tempat kejadian.
7) Menyiapkan kegiatan pengamanan dan penyitaan barang dan surat.
8) Menyiapkan kegiatan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
9) Menyiapkan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
10) Menyiapkan kegiatan penyusunan berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
11) Menyiapkan kegiatan penanganan tindak pidana ringan dan sidang ditempat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
12) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Penegakan Peraturan Daerah.
13) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Penegakan Peraturan Daerah.

14) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah.
15) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

dang Satuan Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Mobilisasi, Pengorganisasian dan Pemberdayaan. Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat juga memiliki tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk dapat mewujudkan tugas sebagaimana mestinya, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
e. Pelaksanaan kegiatan pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
f. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penanggulangan bencana, penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
h. Pelaksanaan kegiatan gelar pasukan Satuan Perlindungan Masyarakat.
i. Pelaksanaan kegiatan sistem komunikasi Satuan Perlindungan Masyarakat wilayah;
j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
k. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
l. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat.
m. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat.
n. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan distribusi prasarana dan sarana Perlindungan Masyarakat serta sistem keamanan lingkungan.
o. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyajian data informasi serta karakteristik sosial budaya masyarakat.
p. Pelaksanaan kegiatan penyusunan peta kerawanan kriminalitas, kerawanan konflik, dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
q. Pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
r. Pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan kelengkapan Satuan Perlindungan Masyarakat.

s. Pelaksanaan kegiatan penyusunan standardisasi kelengkapan sarana dan prasarana sistem keamanan lingkungan.
t. Pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat.
u. Pelaksanaan kegiatan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat secara berkala dan pemberian Kartu Tanda Anggota.
v. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
w. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
x. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan.
y. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat terdiri atas 2 seksi dan 1 subkoordinator yakni Seksi Mobilisasi, Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan dan Subkoordinator Data dan Informasi. Masing-masing tugas seksi dan subkoordinator Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dijabarkan sebagai berikut:

a. Seksi Mobilisasi

Seksi Mobilisasi memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Mobilisasi.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Mobilisasi.
5) Menyiapkan kegiatan pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
6) Menyiapkan kegiatan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7) Menyiapkan kegiatan fasilitasi penanggulangan bencana, penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
8) Menyiapkan kegiatan gelar pasukan Satuan Perlindungan Masyarakat.
9) Menyiapkan kegiatan sistem komunikasi Satuan Perlindungan Masyarakat wilayah.
10) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Mobilisasi.
11) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Mobilisasi.
12) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Mobilisasi; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan

Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan.

2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan.
5) Menyiapkan kegiatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
6) Menyiapkan kegiatan peningkatan kualitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
7) Menyiapkan kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat.
8) Menyiapkan kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat.
9) Menyiapkan kegiatan penyediaan dan distribusi prasarana dan sarana Perlindungan Masyarakat serta sistem keamanan lingkungan.
10) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan.
11) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan.
12) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan.
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Data dan Informasi

Subkoordinator Data dan Informasi memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Data dan Informasi.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Data dan Informasi.
5) Menyiapkan kegiatan pengumpulan dan penyajian data informasi serta karakteristik sosial budaya masyarakat.
6) Menyiapkan kegiatan penyusunan peta kerawanan kriminalitas, kerawanan konflik, dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
7) Menyiapkan kegiatan analisa kebutuhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
8) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan kelengkapan Satuan Perlindungan Masyarakat.
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan standardisasi kelengkapan sarana dan prasarana sistem keamanan lingkungan.
10) Menyiapkan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat.
11) Menyiapkan kegiatan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat secara berkala dan pemberian Kartu Tanda Anggota.
12) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi.
13) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Data dan Informasi.

14) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi.
15) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Sumber daya dalam suatu instansi atau badan usaha mencakup seluruh aset yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menjalankan operasionalnya. Ini mencakup aset fisik seperti gedung, peralatan, dan teknologi, serta sumber daya manusia, keuangan, dan informasi. Sumber daya manusia merupakan komponen kunci yang melibatkan karyawan, manajemen, dan staf lainnya yang berkontribusi pada operasional sehari-hari dan pertumbuhan jangka panjang organisasi.

Selain itu, sumber daya keuangan, termasuk modal dan aset keuangan lainnya, sangat penting untuk menjalankan operasi bisnis. Informasi, baik internal maupun eksternal, juga merupakan sumber daya esensial karena memberikan wawasan dan pemahaman yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pengelolaan efektif semua sumber daya ini adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan organisasi dalam pasar yang kompetitif. Dengan memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, instansi atau badan usaha dapat mencapai efisiensi operasional, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

a. Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks instansi atau badan usaha mencakup semua individu yang bekerja di dalamnya dan dianggap sebagai aset paling berharga organisasi. SDM tidak hanya terdiri dari karyawan yang menjalankan tugas operasional sehari-hari, tetapi juga manajemen dan staf lainnya yang berperan penting dalam kesuksesan organisasi. Peran SDM meliputi pengelolaan proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, serta pengelolaan kebijakan dan budaya organisasi yang mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan.

Pentingnya SDM dalam instansi atau badan usaha tidak bisa diabaikan, karena mereka merupakan faktor penentu dalam pencapaian tujuan organisasi. SDM yang berkualitas dan terampil dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang efektif menjadi prioritas utama bagi manajemen untuk memastikan organisasi dapat bersaing secara efektif di pasar dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang hingga bulan Agustus Tahun 2025 memiliki 264 pegawai bersatatus PNS dan PPPK. Dilihat dari tingkat pendidikannya mayoritas pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang berpendidikan SMA sebanyak 213 orang (80,68%) dan berpendidikan D4/S1 sebanyak 32 orang (12,12%). Meskipun demikian hingga tahun 2025 terdapat sebanyak 7 orang pegawai telah berpendidikan S2 (2,65%). Secara rinci kondisi jumlah pegawai berdasarkan pendidikan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang bulan Agustus Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

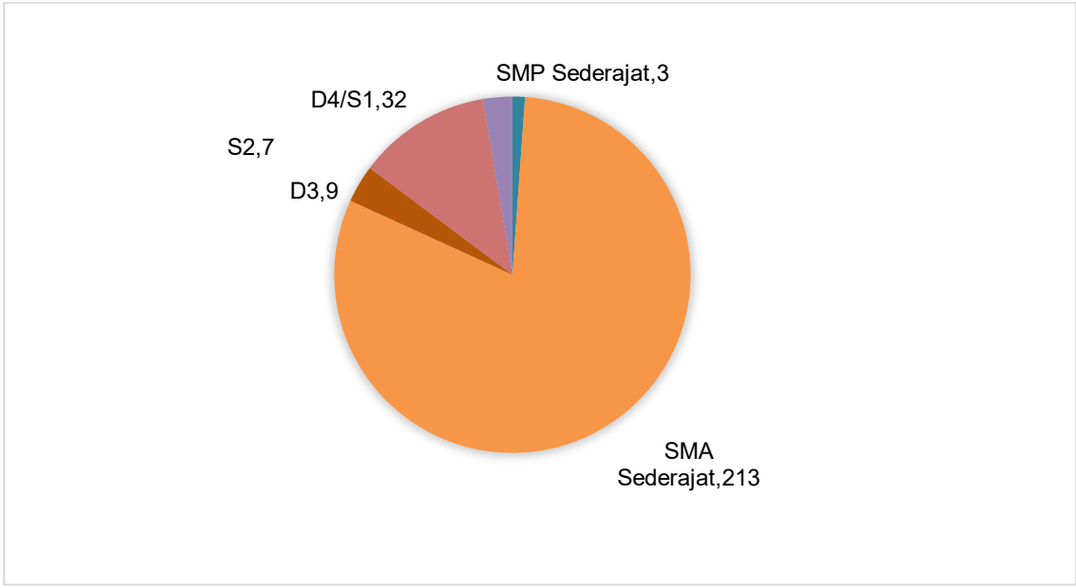

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Tahun 2025
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, 2025

Selanjutnya secara rinci informasi mengenai kualifikasi pendidikan dari sumber daya manusia yang tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang hingga bulan Juni 2024 dapat ditemukan dalam tabel berikut.

Tabel 0.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Tahun 2025

NO	STATUS / GOL RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									
		SD	SMP	SMA	D-1	D-2	D-3	D-4/S-1	S-2	S-3	Jumlah
1	Golongan II/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Golongan II/b	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
3	Golongan II/c	-	2	3	-	-	8	-	-	-	13
4	Golongan II/d	-	-	9	-	-	-	-	-	-	14
5	PPPK Gol V	-	-	177	-	-	-	-	-	-	177
5	PPPK Gol VI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	JUMLAH	**-**	**3**	**191**	**-**	**-**	**9**	**-**	**-**	**-**	**203**
1	Golongan III/a	-	-	18	-	-	-	15	-	-	33
2	Golongan III/b	-	-	4	-	-	-	2	1	-	7
3	Golongan III/c	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7
4	Golongan III/d	-	-	-	-	-	-	6	2	-	8
	JUMLAH	**-**	**-**	**22**	**-**	**-**	**-**	**30**	**3**	**-**	**55**
1	Golongan IV/a	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5
2	Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**4**	**-**	**6**
	JUMLAH ASN (PNS + PPPK)	**-**	**3**	**213**	**-**	**-**	**9**	**32**	**7**	**-**	**264**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, 2024

Selanjutnya dilihat dari golongan mayoritas pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang merupakan pegawai berstatus Golongan III sebanyak 55 orang pegawai dan Golongan II sebanyak 12 orang pegawai. Sisanya sebanyak 6 orang pegawai merupakan Golongan IV dan terdapat 1 orang pegawai yang merupakan pagawai PPPK Golongan VI dan 177 Pegawai PPPK Gol V. Secara rinci kondisi jumlah pegawai berdasarkan

Golongan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang hingga Agustus Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

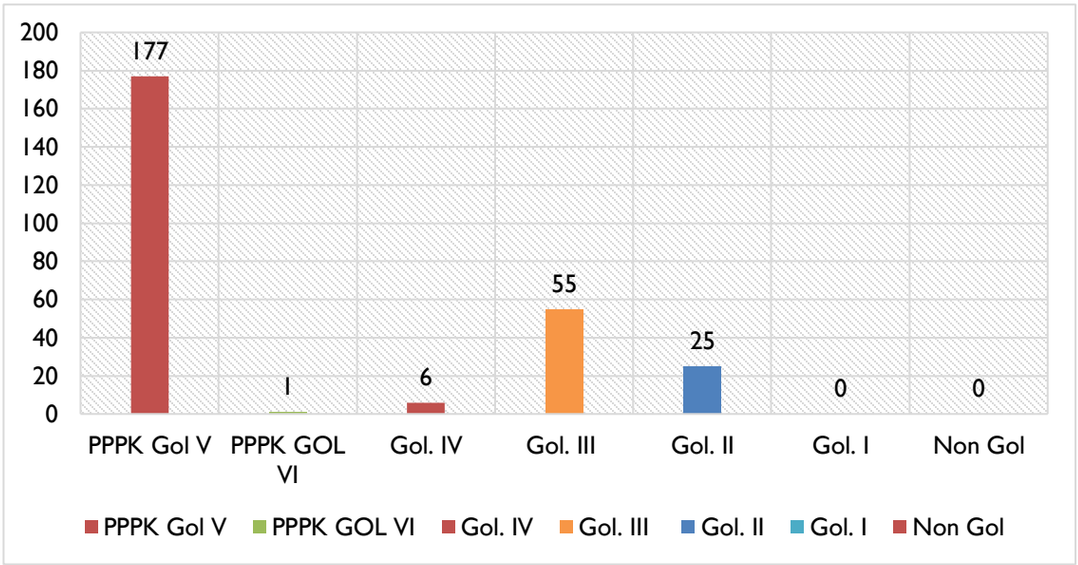

Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Tahun 2025

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, 2025

Selanjutnya dilihat dari rincian golongannya mayoritas pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang merupakan pegawai PPPK Golongan V dngan jumlah sebanyak 177 Pegawai, PNS Golongan III/a dengan jumlah sebanyak 33 pegawai dan Golongan II/d sebanyak 9 pegawai. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang di dominasi pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 82 orang atau sebesar 86,74% dari total seluruh pegawai. Secara rinci kondisi jumlah pegawai berdasarkan Golongan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang hingga bulan Agustus Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 0.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Tahun 2025

NO	STATUS / GOLONGAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	Jumlah
1	Golongan II/a	1	-	**1**
2	Golongan II/b	2	-	**2**
3	Golongan II/c	8	5	**13**
4	Golongan II/d	9	-	**9**
5	PPPK Gol V	155	22	**177**
6	PPPK Gol VI	-	1	**1**
	JUMLAH	**175**	**28**	**203**
1	Golongan III/a	29	4	**33**
2	Golongan III/b	5	2	**7**
3	Golongan III/c	7	-	**7**
4	Golongan III/d	7	1	**8**
	JUMLAH	**50**	**7**	**55**
1	Golongan IV/a	5	-	**5**
2	Golongan IV/b	1	-	**1**
3	Golongan IV/c	-	-	**-**
4	Golongan IV/d	-	-	**-**
5	Golongan IV/e	-	-	**-**
	JUMLAH	**6**	**-**	**6**
	JUMLAH ASN (PNS + PPPK)	**231**	**35**	**264**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, 2025

b. Sarana Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana dalam konteks instansi atau badan usaha merujuk pada infrastruktur fisik, fasilitas, dan peralatan yang mendukung operasi dan kegiatan organisasi. Ini mencakup berbagai elemen seperti gedung kantor, pabrik, gudang, fasilitas produksi, jaringan komunikasi, perangkat keras komputer, peralatan teknis, dan fasilitas transportasi. Sarana dan prasarana ini merupakan fondasi penting bagi keberhasilan operasional organisasi, karena menyediakan lingkungan yang memadai bagi karyawan untuk bekerja, menyimpan atau memproses barang atau informasi, serta menyalurkan produk atau layanan kepada pelanggan.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, yang berasal dari APBD maupun APBN, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 0.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Tahun 2024

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
1	Website Satpol PP pada alamat , facebook, instagram (satpolpp.smg) dan twitter (@satpolpp_smg)	√		1 unit
2	Papan Pengumuman	√		1 unit
3	Peralatan Terdiri dari:			
a	Komputer	√		
b	Laptop	√		
c	Printer	√		
d	Camera dan Handycam	√		
e	Perlengkapan Dahura	√		
f	Tameng	√		
g	HT	√		
4	Kendaraan Dinas terdiri dari:			
a	Roda dua	√		20 unit
b	Roda 4 / Lebih	√		20 unit

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
c	Poskotis	√		1 unit
d	Mobil Patroli	√		5 unit
e	Segway Hoverboard	√		13 unit
f	Truck dan Bus	√		10 Unit
g	Sepeda	√		12 Unit
h	Perahu Karet dan Mesin	√		2 Unit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, 2024

Selain pada inventarisasi sarana dan prasarana milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, peninjauan aset dinas juga dilakukan pada aset tanah dan bangunan yang dimiliki. Berikut merupakan tabel aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang.

Tabel 0.3 Gedung dan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang

JENIS BARANG	KONDISI	LUAS LANTAI	ALAMAT	STATUS	ASAL
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Ronggolawe No. 10	Milik Pemda	APBD

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Semarang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi dijalankan dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Prinsip ini dilaksanakan dengan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang berarti penanganan urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Hal ini bertujuan agar kinerja pemerintahan daerah tetap selaras dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar atau indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan penganggaran, prinsip-prinsip SPM harus diperhatikan yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki batas waktu pencapaian. Perlu dipahami bahwa SPM berbeda dengan Standar Teknis, yang merupakan

faktor pendukung pencapaian SPM. Pelaksanaan peraturan pemerintah ini bertujuan untuk:

1. Menjamin hak masyarakat untuk menerima pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu.
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.
3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.
4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja, sehingga SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur.
5. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintahan Daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.
6. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif.
7. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dituntut untuk terus melakukan pelayanan terhadap Masyarakat di lingkup wilayah Kota Semarang sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan. Secara rinci Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan regulasi yang mendasari pelaksanaan kinerja SPM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang. Dalam Permendagri 121 tahun 2018 Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

a. Standar operasional prosedur Satpol PP.
b. Standar sarana prasarana Satpol PP.
c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat.
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang :

a. Capaian Kinerja Satpol PP Kota Semarang

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam setiap bidang tugasnya dibagi menjadi berbagai tingkat pencapaian, yang terperinci dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Tujuan dan Sasaran																		
	persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	%	IKU		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	100%	100%	100%	5%
	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	%	IKU		100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	IKU		100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator kinerja kunci																		
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat	%	IKK		100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	diselesaikan (SPM)																		
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	IKK		60%	62%	64%	66%	68%	60%	62%	64%	66%	68%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator SPM																		
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaika				100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada				100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Bagian ini akan menjelaskan anggaran dan penggunaan dana yang direalisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam konteks ini, akan diuraikan tahun-tahun di mana rasio antara penggunaan dana yang direalisasikan dan anggaran dapat dianggap baik atau kurang baik, serta aspek-aspek di mana kinerja tersebut dinilai baik atau kurang baik. Selanjutnya, akan dibahas faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hasil interpretasi ini bertujuan untuk menggambarkan potensi dan tantangan dalam pendanaan layanan yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Tabel 0.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	Rp.35.846.569.244	Rp.23.915.022.313	Rp.20.110.119.219	Rp.19.748.033.572	N/A	RP.32.911.257.939	Rp.23.302.640.749	Rp.17.303.346.750	Rp.18.960.505.295	N/A	91,81%	97,44%	95,41%	96,01%	-11,26%	-4,50%
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	Rp.9.955.845.459	Rp.8.261.701.400	Rp.18.135.148.901	Rp.15.986.742.600	N/A	Rp.9.181.097.473	Rp.7.926.521.173	Rp.17.303.346.750	Rp.15.233.654.775	N/A	92,22%	95,44%	95,41%	95,25%	-6,30%	-3.9%

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pengembangan pelayanan pemerintah daerah adalah proses yang kompleks dengan berbagai tantangan dan peluang yang harus diperhatikan dengan seksama. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain dijabarkan sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang sebagai berikut:

1. Tingginya daya tarik Kota Semarang dalam bidang Ekonomi, Sosial maupun Budaya, Sehingga menyebabkan kunjungan wisata meningkat, dan akan berpotensi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada.
2. Semakin banyaknya Ruang Publik di Kota Semarang, sehingga akan menimbulkan keramaian dan berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Pemilihan umum secara serentak memiliki dampak dan pemicu terjadinya konflik sosial di Masyarakat.
4. Meningkatnya pengawasan dari sektor publik kepada Satpol PP baik secara langsung maupun melalui media Sosial, sehingga tuntutan terhadap penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum semakin meningkat.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang mengandung sanksi.

b. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota.
2. Adanya peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja.
3. Adanya Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengandung sanksi, sebagai dasar penegakkan Hukum di wilayah Kota Semarang.
4. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.
5. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga rasa aman, tertib dan tenteram.
6. Tingginya komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan *Good Governance*.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Satpol PP Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Satpol PP Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Satpol PP Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 98 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satpol PP Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Satpol PP Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Satpol PP Kota Semarang yaitu: **"Masih rendahnya tingkat ketertiban, keamanan, dan keindahan wilayah dan stabilitas keamanan daerah"**. yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rumusan Permasalahan
"Masih rendahnya tingkat ketertiban, keamanan, dan keindahan wilayah dan stabilitas keamanan daerah"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum Maksimalnya layanan Pendukung Penegakan Perda	Minimnya tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap kegiatan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat.
		Koordinasi antara urusan umum dan pelaksana teknis dalam mendukung kegiatan penanganan gangguan belum berjalan maksimal.
2	Belum terlaksananya bimbingan masyarakat secara efektif dan menyeluruh	Belum optimalnya sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban umum
		Data pengaduan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk analisis tren gangguan ketertiban di wilayah
		Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait peraturan daerah
3	Belum optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah	Minimnya forum komunikasi antar lembaga dalam membahas isu ketentraman masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah di lapangan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Minimnya kegiatan pelatihan, bimtek, atau uji kompetensi bagi PPNS secara berkala
		Terbatasnya dukungan teknis dan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan PPNS.
4	Belum optimalnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketertiban di lingkungan	Belum optimalnya pengorganisasian dan pemberdayaan anggota Linmas di tingkat kelurahan/desa
		Belum tersedia sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat
		Belum optimalnya pembinaan secara berkesinambungan karena keterbatasan anggaran dan instruktur
5	Belum optimalnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum	Koordinasi operasional antarunit belum optimal dalam merespons gangguan keamanan dan ketertiban.
		Pengendalian kegiatan penegakan ketertiban umum belum berjalan optimal
		Kurangnya personel dan sarana pendukung dalam menjaga ketertiban di ruang publik

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Satpol PP Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Minimnya tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap kegiatan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat;
2. Koordinasi antara urusan umum dan pelaksana teknis dalam mendukung kegiatan penanganan gangguan belum berjalan maksimal;
3. Belum optimalnya sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban umum;
4. Data pengaduan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk analisis tren gangguan ketertiban di wilayah;
5. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait peraturan daerah;
6. Minimnya forum komunikasi antar lembaga dalam membahas isu ketentraman masyarakat;
7. Minimnya kegiatan pelatihan, bimtek, atau uji kompetensi bagi PPNS secara berkala;
8. Terbatasnya dukungan teknis dan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan PPNS.
9. Belum optimalnya pengorganisasian dan pemberdayaan anggota Linmas di tingkat kelurahan/desa;

10. Koordinasi operasional antarunit belum optimal dalam merespons gangguan keamanan dan ketertiban.
11. Pengendalian kegiatan penegakan ketertiban umum belum berjalan optimal;
12. Kurangnya personel dan sarana pendukung dalam menjaga ketertiban di ruang publik.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahap awal dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMN menekankan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan ketahanan sosial budaya. Dalam kerangka tersebut, terdapat sejumlah agenda pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Pertama, RPJMN menempatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai salah satu prioritas. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pencapaian mutu layanan dasar tersebut hingga menjangkau seluruh wilayah. Hal ini menjadi relevan bagi Satpol PP Kota Semarang untuk memastikan seluruh kecamatan dan kelurahan mendapatkan layanan Trantibum dan Linmas yang terstandar, terukur, dan merata.

Kedua, RPJMN menekankan pentingnya supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasinya bagi Satpol PP adalah perlunya penguatan kepastian hukum dalam penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota melalui SOP yang konsisten, koordinasi lintas instansi, dokumentasi yang transparan, serta pengawasan yang akuntabel.

Ketiga, RPJMN juga memberikan perhatian besar pada pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan kelompok rentan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program Satpol PP perlu mengadopsi prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), misalnya dengan peningkatan keterlibatan personel perempuan, penguatan layanan pengaduan yang ramah perempuan dan anak, serta penanganan kasus yang bersifat sensitif gender. Satpol PP juga memiliki kontribusi nyata dalam mendukung Kota Layak Anak (KLA) melalui pencegahan eksploitasi anak di ruang publik, pengawasan aktivitas usaha yang melibatkan anak, dan koordinasi dalam penanganan kasus anak.

Keempat, RPJMN 2025-2029 mendorong pemerataan pembangunan wilayah melalui pendekatan Kecamatan Berdaya. Satpol PP berperan dengan memperkuat kapasitas Linmas dan kemitraan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan agar memiliki daya cegah terhadap potensi gangguan ketertiban. Dukungan juga diberikan terhadap pelaksanaan layanan dasar, termasuk kegiatan Posyandu (6 SPM), dengan menjamin ketertiban dan keamanan agar pelayanan masyarakat berjalan aman dan lancar.

Kelima, RPJMN menekankan pentingnya kerukunan sosial, toleransi, dan ketahanan budaya. Dalam konteks ini, Satpol PP Kota Semarang memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui fasilitasi, deteksi dini, dan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta mewujudkan kerukunan dan harmonisasi wilayah melalui pengawasan, penyuluhan, dan operasi penanganan konflik sosial.

Berdasarkan telaah di atas, berikut beberapa catatan strategis yang bisa dimasukkan ke dalam Renstra :

Tabel 2.8
Implikasi dan Rekomendasi Strategis untuk Renstra Satpol PP Kota Semarang

Area	Rekomendasi Strategis
Standar Pelayanan (SPM Trantibum)	Memasukkan target pencapaian mutu SPM Trantibum, termasuk cakupan minimal 100% kecamatan kelurahan. Membuat indikator yang memantau kepatuhan terhadap standar.
Tata Kelola & Hukum	Perkuat SOP dan regulasi internal; pastikan prosedur penegakan Perda jelas, akuntabel, dan terdokumentasi; audit kinerja dan pengawasan internal secara rutin.
Gender & Rentan	Integrasi PUG dan ARG sebagai bagian dari indikator kinerja; layanan pengaduan yang sensitif gender, perlindungan anak; inklusivitas personel.
Data dan Informasi	Kembangkan sistem data Satpol PP/linmas yang terverifikasi & real-time; integrasi data ke sistem satu data daerah/kota; penggunaan data kalkulatif dalam pengambilan keputusan.
Kewilayahan / Kecamatan/Kelurahan	Tingkatkan peran Satlinmas di wilayah kecamatan/kelurahan; pendekatan berbasis komunitas; cegah gangguan lokal melalui pengawasan warga; operasi cepat di tingkat lokal.
Anggaran	Pastikan Renstra menyertakan kebutuhan anggaran yang realistis untuk peningkatan kapasitas, pelatihan, operasi, serta pemutakhiran sarana/prasarana ketertiban umum; integrasi anggaran responsif gender dan dukungan kelompok rentan.
Partisipasi Masyarakat & Transparansi	Program penyuluhan masyarakat; mekanisme pengaduan yang bisa diakses publik; pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan deteksi dini potensi gangguan.

Dengan demikian, telaah terhadap RPJMN 2025-2029 menunjukkan bahwa peran Satpol PP Kota Semarang tidak hanya sebatas penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota, melainkan juga sebagai aktor penting dalam mewujudkan layanan dasar Trantibum, memperkuat tata kelola hukum yang transparan, melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak, mendukung pemberdayaan wilayah, serta menjaga kerukunan sosial. Integrasi arah kebijakan nasional ke dalam Renstra Satpol PP Kota Semarang akan memperkuat kontribusi Satpol PP dalam pembangunan daerah yang aman, tertib, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, Walikota dan wakilnya harus merumuskan tujuan pembangunan wilayah yang mereka pimpin, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka waktu lima tahun. Perumusan tujuan ini harus mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di wilayah tersebut, serta budaya yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, tujuan ini harus sejalan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 tahun, agar tujuan kepala daerah tetap dalam koridor pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJPD.

Tujuan pembangunan yang dirumuskan oleh kepala daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat tujuan pembangunan dan strategi untuk mencapainya dalam bentuk Visi dan Misi daerah. Visi daerah menjadi

panduan utama dan arah pembangunan serta program kerja selama lima tahun kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi ini penting karena menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta.

Berdasarkan visi dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2025 - 2045,dan mempertimbangkan evaluasi RPJMD Kota Semarang periode sebelumnya, serta mempertimbangkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

"**KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF**"

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan rasio gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas eksporimpor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan
menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata

bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga

mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi
yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:
- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi **"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif"**, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang.

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

konomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem e budgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pembangunan Kota Semarang 5 (lima) tahun dari 2025 sampai dengan 2029 merupakan perjalanan yang panjang. Terdapat berbagai macam potensi yang perlu dikembangkan maupun isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang harus diatasi yang akan bermunculan secara dinamis selamat periode tersebut. Berbagai kebijakan dan strategi akan diambil Kota Semarang dalam upayanya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Semarang. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Keberhasilan dari semua program pembangunan ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Setiap warga dari individu hingga komunitas memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk memberi masukan, mendukung, menjaga maupun mengevaluasi jalan pembangunan Kota Semarang. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aspek teknis, seperti perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat, integrasi sistem pelayanan publik untuk efisiensi dan transparansi, pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya komunikasi yang transparan dan kerjasama yang solid, setiap tantangan dapat diatasi dan setiap potensi dapat dikembangkan. Visi dan misi Kota Semarang didukung dengan tagline:

Tabel 2.7 Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat!	
Bangun Infrastruktur Berkualitas	***Humanis dalam Melayani***
Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan	***Ekonomi Inklusif***
Ramah Lingkungan	***Budaya yang Dilestarikan***
Sosial Harmonis Tanpa Konflik	***Aksesibilitas Meningkat***
Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin	***Tangguh menghadapi Tantangan***
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Utamakan Kesejahteraan Bersama	

Gambar 0.4 Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang
Sumber: Dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah Meningkatnya Stabilitas Keamanan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai Misi ke 1 **"Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian".**

Misi tersebut mempunyai tujuan yaitu:

"Meningkatkan lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif"

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

c. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementrian Dalam Negeri dalam Pemermendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian dalam Negeri Tahun 2020-2024, memuat Visi : "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri". Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 2. 8
Matrik persandingan tujuan dan sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).	Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis: a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Demokrasi Indonesia. (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. (3) Indeks Kinerja Ormas b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).

Tujuan	Sasaran
	(3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya. c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional. d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik". (2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)	Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut: a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional. (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni. b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah. c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM. (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik". (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi. (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama". (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah. d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data-data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).	Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis: a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran
	Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Pengawasan Internal. (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus. c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Dari tujuan dan sasaran kementerian dalam negeri tersebut, program kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Satpol PP adalah pada program Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada sasaran :

1. Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
3. Fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa
4. Pelaksanaan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM
5. Fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM
6. Pembentukan Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan
7. Pemenuhan aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
8. Pelaksanaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
9. Fasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP
10. Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)
11. Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik (QW)
12. Fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa
13. Fasilitasi pusat dan daerah dalam hal Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM

c. Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Provinsi Jawa Tengah

Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Semarang dengan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu pada misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious toleran dan guyub untuk menjaga NKRI., “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” sasarannya adalah Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan juga pada Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Dalam hal pelaksanaan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah perlunya peningkatan kinerja terutama dalam hal :

1. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan lebih mengedepankan upaya-upaya preemtif disamping upaya yang sifatnya represif;
2. Pembentukan Sekretariat PPNS dan menjamin operasionalnya secara efektif;
3. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan pembentukan kader-kader tramtibum di desa dan kelurahan dengan harapan dapat menurunkan angka gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP;
5. Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP sesuai stándar kebutuhan.

Terkait dengan prioritas kinerja yang dilaksanakan Satpol PP Jawa Tengah, Satpol PP Kota Semarang juga melaksanakan sebagai berikut:

1. Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
2. Pemberdayaan PPNS dalam penegakan Perda;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana Satpol PP kebutuhan.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Satpol PP Kota Semarang . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Satpol PP Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Satpol PP Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Satpol PP Kotasemarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembengan wilayah Kabupaten/Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

KODE				INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
IV				**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**	
IV	**A**			**PENGEMBANGAN STRUKTUR PELAYANAN**	
IV	A	1		Pengembangan Fasilitas Pelayanan Regional	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV	A	2		Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV	A	3		Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV	A	4		Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV	**B**			**RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**	
IV	B	1		Sistem Transportasi Darat	
IV	B	1	1	Sistem Transportasi Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
IV	B	1	2	Transportasi Kereta Api	
IV	B	1	3	Sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan	
IV	B	2		Sistem Transportasi Laut	
IV	B	3		Pelabuhan Udara	
IV	**C**			**RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN ENERGI**	
IV	C	1		Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya	
IV	C	2		Peningkatan dan pengembangan Jaringan infrastruktur minyak bumi	
IV	C	3		Peningkatan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	
II	**D**			**SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**	
IV	D	1		Peningkatan dan pengembangan jaringan tetap	
IV	D	2		Peningkatan dan pengembangan jaringan bergerak	
IV	**E**			**SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
IV	E	1		Peningkatan sumber air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
IV	E	2		Prasarana sumber air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
IV	E	3		Pengendalian rob dan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

KODE				INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
IV	**F**			**INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**	
IV	F	1		Rencana Sistem Persampahan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
IV	F	2		Rencana Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
IV	F	3		Rencana Prasarana Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
IV	F	4		Sistem Prasarana Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
IV	F	5		Jaringan Jalan Pejalan Kaki	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
IV	F	6		Rencana Jaringan Evakuasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
IV	**G**			**RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA LAINNYA**	
IV	G	1		Rencana Jaringan Jalan Sepeda	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
IV	G	2		Rencana Sistem Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
IV	G	3		Rencana Pengaturan Kegiatan Sektor Informal	
II				**PERWUJUDAN POLA RUANG**	
II	**A**			**KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**	
II	A	1		Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
II	A	2		Kawasan perlindungan setempat;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
II	A	3		Ruang terbuka hijau;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
II	A	4		Kawasan cagar budaya;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
II	A	5		Kawasan rawan bencana alam.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
II	**B**			**KAWASAN BUDIDAYA**	
II	B	1		Kawasan hutan produksi	-
II	B	2		Kawasan perumahan	Program Pengembangan Perumahan
II	B	3		Kawasan perdagangan dan jasa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
II	B	4		Kawasan perkantoran	Program Penataan Bangunan Gedung

KODE				INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
II	B	5		Kawasan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
II	B	6		Kawasan peruntukan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
II	B	7		Kawasan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
II	B	8		Kawasan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
II	B	9		Kawasan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
II	B	10		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
II	B	11		Kawasan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
II	B	12		Kawasan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
II	B	13		Kawasan Pertambangan dan energi	-
II	B	14		Kawasan Kesehatan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
II	B	15		Kawasan Peribadatan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
II	B	16		Ruang Terbuka Non Hijau	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
II	**C**			**KAWASAN STRATEGIS**	
II	C	1		Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	2		Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	3		Pengembangan Kawasan Waduk Jatibarang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	4		Pengembangan Kawasan Reklamasi Pantai	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	5		Peningkatan Kawasan Masjid Agung Semarang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	6		Peningkatan Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	7		Peningkatan Kawasan Pendidikan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	8		Peningkatan Kawasan Gedong Batu	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	9		Pengembangan Kawasan Kota Lama	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

Satpol PP Kota Semarang Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Satpol PPKota Semarang tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Satpol PP Kota Semarang dalam lima tahun mendatang.

E. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain:

1. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender;
3. Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah;
4. Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim;
5. Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
6. Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan
7. Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Satpol PP adalah terkait *"Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab."*

F. Isu Strategis RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Penyelenggaraan good governance merupakan sebuah solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, transparansi, dan mengedepankan akuntabilitas. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Kota Semarang dalam mencapai hal tersebut, antara lain terkait pengelolaan keuangan, pelayanan publik, manajemen kota, dan strategi kepemimpinan.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, upaya realisasi komponen-komponen PAD harus terus dioptimalkan untuk menghindari defisit pada pos-pos yang ada. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dari masyarakat yang belum mencapai 100%, baik dalam pembayaran maupun mendaftarkan tempat usahanya. Mengingat pajak merupakan instrumen penting bagi pembiayaan daerah, maka pemerintah harus terus menggenjot lewat berbagai macam inovasi agar wajib pajak mampu dan mau membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah

tercapai di Kota Semarang. Di sisi lain, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masih mendapat sorotan dimana tingkat kriminalitas kota masih tinggi karena cakupan patroli, rasio petugas linmas, sarana prasarana pengamanan masih belum memenuhi standar minimal dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Poin terakhir yaitu strategi kepemimpinan masih perlu dioptimalkan, khususnya terkait peningkatan jumlah kerjasama antar daerah seperti yang diamanatkan dalam Perpres No. 78 Tahun 2018 dan Perpres No. 79 Tahun 2019. Hal ini penting agar peran Kota Semarang sebagai perkotaan inti dapat maksimal serta terciptanya keterpaduan dalam suatu regional Kedungsepur. Masih adanya ketidakkonsistenan dalam penerjemahan dokumen rencana jangka menengah ke dalam rencana tahunan juga menyebabkan kinerja pembangunan di Kota Semarang ikut terpengaruhi.

G. Penentuan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Satpol PP Kota Semarang sebagai berikut:

1. Penegakkan Perda dan Perkada. Adanya penyusunan Perda dan Perkada yang sangat Dinamis akan berdampak pada implementasi terhadap penegakkan Perda dan Perkada terutama yang memuat sanksi. Selain itu masih tingginya perilaku menyimpang pada masyarakat terutama dalam ppelanggaran Perda dan Perkada belum menimbulkan efek jera, sehingga pelanggaran tersebut dapat berulang.
2. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan dan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki daya tarik dari sisi Ekonomi, Budaya, Pariwisata dan Sosial tentu akan memiliki potensi gangguan Trantibum dan konflik Sosial yang tinggi, sehingga perlu adanya antisipasi sesuai dengan tupoksi Satpol PP.
3. Penyelesaian Aduan Masyarakat. Adanya kemajuan Teknologi Informasi, memudahkan masyarakat dalam memberikan aduan atas pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi, sehingga perlu adanya respon cepat dari Satpol PP dalam melayani aduan masyarakat tersebut.

Dari beberapa isu-isu diatas maka maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2.10
Isu Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2025 - 2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban terus meningkat	Masih rendahnya tingkat ketertiban, keamanan, dan keindahan wilayah dan	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan	Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota Besar	Ketentraman dan ketertiban umum sebagai prasyarat pembangunan	Tantangan keamanan kawasan strategis	Terciptanya Masyarakat yang tertib dan taat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
	stabilitas keamanan daerah	bertanggung jawab				

Selain isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya, Satpol PP Kota Semarang juga berperan penting dalam mendukung berbagai agenda pembangunan lintas sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Kota. Keterkaitan ini tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum daerah, tetapi juga dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, inklusif, serta berdaya saing.

Pertama, Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi salah satu landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program Satpol PP. Penerapan PUG dimaksudkan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan mampu menjawab kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Satpol PP, hal ini mencakup peningkatan jumlah personel perempuan dalam struktur organisasi, penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak secara lebih sensitif, hingga penyediaan layanan pengaduan masyarakat yang ramah gender. Dengan demikian, pelayanan Satpol PP diharapkan lebih adil, responsif, dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Kedua, Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan PUG dapat terimplementasi secara nyata. Anggaran yang disusun tidak hanya memperhatikan aspek operasional penegakan Perda, tetapi juga diarahkan pada kegiatan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Misalnya, dukungan pada penyuluhan hukum yang inklusif, program pemberdayaan Linmas perempuan, serta fasilitasi ruang publik yang aman dan nyaman untuk semua.

Ketiga, Satpol PP turut mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA). Kontribusi ini diwujudkan melalui pencegahan dan penertiban aktivitas yang mengeksploitasi anak di ruang publik, pengawasan agar anak tidak terlibat dalam pelanggaran Perda, serta koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam penanganan kasus anak. Selain itu, program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan Satpol PP juga diarahkan untuk membangun lingkungan yang ramah anak, aman dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang mereka.

Keempat, dalam mendukung program Kecamatan Berdaya, Satpol PP melalui peran Linmas memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat kelurahan/desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Penguatan ini meliputi peningkatan kompetensi anggota Linmas, pelibatan aktif dalam penanganan potensi gangguan trantibum, serta peningkatan sinergi dengan perangkat kecamatan untuk mewujudkan wilayah yang mandiri dan berdaya.

Kelima, dukungan terhadap Posyandu (6 SPM) juga menjadi bagian penting peran Satpol PP. Kehadiran personel Satpol PP dalam menjaga

ketertiban pelaksanaan Posyandu memberikan jaminan bahwa layanan kesehatan dasar, khususnya untuk ibu dan anak, dapat berjalan lancar, aman, dan tertib. Dengan demikian, upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan mendapat dukungan penuh dari sisi ketenteraman dan ketertiban umum.

Keenam, Satpol PP berperan dalam menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Semarang. Hal ini diwujudkan melalui pengawasan, fasilitasi, dan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta instansi terkait lainnya untuk mencegah potensi konflik sosial berbasis agama. Upaya ini penting untuk memastikan Semarang tetap menjadi kota yang toleran, damai, dan inklusif bagi seluruh pemeluk agama.

Ketujuh, melalui berbagai program penyuluhan, pengawasan, dan operasi penanganan, Satpol PP juga mendukung terciptanya Kerukunan dan Harmonisasi Wilayah. Peran deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial menjadi kunci dalam memelihara stabilitas sosial di tingkat akar rumput. Sinergi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan terus ditingkatkan agar tercipta lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan kondusif.

Dengan integrasi berbagai agenda lintas sektor tersebut, Satpol PP tidak hanya hadir sebagai aparat penegak Perda dan Peraturan Wali Kota, tetapi juga sebagai mitra strategis pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kota Semarang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam mewujudkan tujuan Perangkat Daerah, tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Dokumen RPJMD.

Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). adapun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP, mendukung pencapaian pada Misi 3 yaitu “Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan”. Sedangkan Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang ditetapkan dengan mengacupada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Keindahan Wilayah.”**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan *Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keindahan wilayah* maka sasaran yang harus dipenuhi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang adalah **“Meningkatnya Stabilitas Keamanan Daerah”.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kota Semarang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Praja

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MENINGKATNYA INTERNALISASI IDEOLOGI PANCASILA, SERTA WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Keindahan Wilayah		Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Angka	76	77	78	79	80	81	DO ; ukuran kuantitatif dalam skala 0–100 yang menunjukkan efektivitas pemerintah daerah (melalui Satpol PP) dalam menjaga kondisi masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Indeks dihitung berdasarkan data gangguan trantibum, efektivitas penanganan, kepatuhan masyarakat, dan persepsi publik. Rumus : (Skor Gangguan + Skor Penanganan + Skor Kepatuan + Skor Persepsi) / 4
		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Daerah	Tingkat efektivitas penegakan peraturan daerah	%	75	76	77	78	79	80	DO : Perbandingan antara Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dengan Jumlah pengaduan pelanggaran Perda yang masuk yang dinyatakan dalam persentase Rumus : $\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang ditangani}}{\text{Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda yang ditargetkan}} x$
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja	Angka	78.8	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	DO : Ukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi hasil sesuai ketentuan yang berlaku. Rumus : *Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat dari entang nilai (0-100)*

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Angka	83	83.5	84	84.5	85	86	DO : Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, berdasarkan unsur pelayanan sesuai ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Rumus : *Nilai Survdey Kepuasan Masyarakat diambil dr aplikasi (Asikmas) dengan rentang nilai (0-100)*

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan Pendukung Penegakan Perda.
2. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan masyarakat secara efektif dan menyeluruh.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.
4. Meningkatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketertiban di lingkungan.
5. Mengotimalkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum.

Tabel 3.2
Tahapan Startegi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan Optimalisasi Penegakan perda dan Perkada	Peningkatan Optimalisasi Penegakan Perda dan Perkada	Penguatan Optimalisasi Penegakan Perda dan perkada	Percepatan Optimalisasi Penegakan Perda dan perkada	Perwujudan Optimalisasi Penegakan Perda dan Perkada

3.2.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Satpol PP KotaSemarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Satpol PP Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Satpol PP Kota Semarang.

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

No.	**Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan**	**Arah Kebijakan RPJMD**	**Arah Kebijakan Renstra**	**Keterangan**
	MENINGKATNYA INTERNALISASI IDEOLOGI PANCASILA, SERTA WAWASAN KEBANGSAAN	Mendorong pengembangan pendidikan karakter dan penguatan nilai kebhinekaan dan toleransi	Meningkatkan mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat secara terstruktur, tepat waktu, dan berbasis data	
			Meningkatkan Koordinasi antara urusan umum dan pelaksana teknis dalam mendukung kegiatan penanganan gangguan agar berjalan maksimal	
			Meningkatkan Koordinasi antara urusan umum dan pelaksana teknis dalam mendukung kegiatan penanganan gangguan agar berjalan maksimal	
			Meningkatkan Koordinasi antara urusan umum dan pelaksana teknis dalam mendukung kegiatan penanganan gangguan agar berjalan maksimal	
			Terlaksananya kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang edukatif dan partisipatif kepada masyarakat dalam rangka mendukung penegakan	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Perda dan Peraturan Kepala Daerah	
			Membangun dan mengoptimalkan forum komunikasi antar lembaga secara terstruktur dan berkelanjutan dalam rangka sinkronisasi penanganan isu ketentraman masyarakat	
			Melaksanakan kegiatan pelatihan, bimtek, atau uji kompetensi bagi PPNS secara berkala. Meningkatkan dukungan teknis dan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan PPNS.	
			Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah di lapangan	
			Mengoptimalkan pengorganisasian dan pemberdayaan anggota Linmas di tingkat kelurahan/desa	
			Mengoptimalkan pembinaan secara berkesinambungan dengan adanya anggaran dan instruktur	
			Mengembangkan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat	
			Mengoptimalkan Koordinasi operasional antarunit dalam merespons gangguan keamanan dan ketertiban	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keindahan wilayah				Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		Kepala Satpol PP
		Meningkatnya stabilitas keamanan daerah			Tingkat efektivitas penegakan peraturan daerah		Kepala Satpol PP
			Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.		Persentase tindak lanjut hasil evaluasi terhadap implementasi SOP dan layanan penegakan Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Uum	Sekretaris Satpol
			Tersusunnya SOP dan evaluasi kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka penegakan perda yang terukur, akuntabel, dan berbasis data.		Persentase kegiatan layanan penegakan Perda yang dilaksanakan sesuai SOP	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
			Meningkatnya kapasitas dan		Persentase anggota satpol	KEGIATAN PENANGANAN	Kasubbag Umum dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			profesionalisme personel Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan ketenteraman dan ketertiban umum		yang mengikuti pelatihan dasar dan pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetensi	GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepegawaian
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Staff Perencanaan dan Evaluasi
				Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	Staff Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Staff Perencanaan dan Evaluasi
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kepatuhan Perda (partisipasi aktif melalui laporan/pengaduan/pencegahan mandiri)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Uum	Kepala Bidang Binmas
				Meningkatkan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan jumlah gangguan ketertiban umum dibanding tahun sebelumnya	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				umum melalui pemantauan, analisis, dan pelaporan informasi secara cepat dan akurat			
				Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, akurat, dan responsif dalam mendukung penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum.	Rata-rata waktu respon terhadap pengaduan masyarakat	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi Pengaduan
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Staff Seksi Kewaspadaan Dini
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalanan an, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Staff Seksi Kewaspadaan Dini
				Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Staff Seksi Pengaduan
				Meningkatnya bimbingan dan penyuluhan yang edukatif dan partisipatif kepada masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah yang telah diberikan penyuluhan	KEGIATAN PENEGAKAN PERDA KAB/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	Sub Koordinator Bimingan dan Penyuluhan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				dalam rangka mendukung penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			
				Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya menaati Perda dan Perkada	Persentase masyarakat yang memahami substansi Perda dan Perkada	KEGIATAN PENEGAKAN PERDA KAB/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	Kepala Seksi Pengaduan
				Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Staff Bimingan dan Penyuluhan
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Staff Seksi Pengaduan
			Meningkatnya perlindungan masyarakat		Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Uum	Kepala Bidang Linmas
				Meningkatkan partisipasi Linmas dalam kegiatan preventif dan responsif terhadap potensi gangguan masyarakat.	Persentase keterlibatan Linmas dalam penanganan trantibum	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Linmas
				Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Kapasitas Anggota Linmas	Persentase anggota Linmas yang memenuhi standar kesiapsiagaan fisik dan mental	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi Mobilisasi
				Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini terkait keberadaan, kapasitas, dan aktivitas Satgas Daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan pemberdayaan	Persentase data satlinmas yang terverifikasi dan mutakhir	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sub Koordinator Data dan Informasi
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Staff Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Linmas

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Kab/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Staff Seksi Mobilisasi
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Staff Data dan Informasi
			Meningkatkatnya Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Uum	Kepala Bidang PPUD
				Meningkatkan koordinasi dan sinergi yang efektif antar lembaga/instansi dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum.	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum di wilayah yang ditangani melalui operasi gabungan antar instansi	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Staff Seksi Hubungan Antar Lembaga
				Meningkatnya operasi penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota	Rasio jumlah pelanggaran yang ditindak dibanding jumlah pelanggaran yang ditemukan	KEGIATAN PENEGAKAN PERDA KAB/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	Kepala Seksi Penegakan Perda
				Meningkatnya penyelesaian pelanggaran Perda yang memberikan efek jera.	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti hingga tuntas sesuai ketentuan hukum	KEGIATAN PENEGAKAN PERDA KAB/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	Kepala Seksi Pembinaan PPNS
				Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Penanganan Atas pelanggaran Perda dan perkada sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Staff Seksi Penegakan Perda

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Staff Seksi Penegakan Perda
				Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Staff Seksi Pembinaan PPNS
				Meningkatnya kompetensi PPNS dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase PPNS yang meningkat kompetensinya	KEGIATAN PEMBINAAN PENYIDIK PNS KAB/KOTA	Kepala Seksi Pembinaan PPNS
				Terbentuknya Sekretariat PPNS	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Staff Seksi Pembinaan PPNS
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Staff Seksi Pembinaan PPNS
				Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Staff Seksi Pembinaan PPNS
			Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Uum	Kepala Bidang Tibumtranmas
				Meningkatnya kegiatan operasional penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mewujudkan ketentraman di masyarakat.	Persentase gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani hingga tuntas	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi Operasional
				Menurunnya potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban umum	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi Ketertiban Umum
				Terlaksananya Penindakan Atas	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman	Staff Seksi Operasional

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
				Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Staff Seksi Ketertiban Umum
				Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota secara terkoordinasi, terukur, dan akuntabel.	Persentase kegiatan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang terlaksana aman dan lancar	KEGIATAN PENEGAKAN PERDA KAB/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	Sub Koordinator Pengendalian
				Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Staff Pengendalian
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Satpol PP			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satpol PP		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan (OPD) yang berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIS
					Persentase kinerja pelayanan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					umum dan kepegawaian Satpol PP		
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Satuan Polisi pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Perencanaan dan evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staff Perencanaan Dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staff Perencanaan Dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staff Perencanaan Dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staff Perencanaan Dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staff Perencanaan Dan Evaluasi
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staff Perencanaan Dan Evaluasi
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staff Perencanaan Dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staff bag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staff bag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staff bag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Staff bag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staff bag Keuangan dan BMD
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatu Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tersedianya layanan administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Staff Bag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satpol PP	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Satpol PP	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi pamong Praja	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan	Persentase pemenuhan	Kegiatan Penyediaan	Kasubag Umum dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja	kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Satuan Polisi pamong Praja yang selesai ditindaklanjuti	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staff Bag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staff Bag Umum dan Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling) Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling)	Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		
		Meningkatnya perlindungan masyaraka		
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	
			KEGIATAN PENEGAKAN PERDA KAB/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI	
			Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
SATPOL PP					42.043.561.416		46.703.500.937		48.731.723.523		49.104.279.191		49.983.060.859		49.983.060.85
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.945.295.045		15.420.646.250		16.062.787.768		16.180.740.040		16.458.965.023		16.458.965.023
Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.	Persentase tindak lanjut hasil evaluasi terhadap implementasi SOP dan layanan penegakan Perda dan Perkada	80	%	81	202.644.727	82	181.715.335	83	195.720.697	84	148.720.697	85	168.720.697	85	168.720.697
1.05.02.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya kualitas SOP dan evaluasi kegiatan penyediaan layanan dalam rangka penegakan Perda yang terukur, akuntabel, dan Berkualitas	**Persentase kegiatan layanan penegakan Perda yang dilaksanakan**	**79**	**%**	**80**	**85.755.690**	**82**	**95.755.690**	**83**	**98.755.690**	**84**	**68.755.690**	**85**	**88.755.690**	**86**	**88.755.690**
1.05.02.01.008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat															
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		Dokumen	1	85.755.690	1	95.755.690	1	98.755.690	1	68.755.690	1	88.755.690	1	88.755.690
Meningkatnya profesionalisme personel Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	**Persentase anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan dasar dan pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetens**	**9**	**%**	**10**	**106.755.210**	**12**	**71.225.818**	**14**	**87.171.200**	**16**	**70.171.200**	**18**	**70.171.200**	**18**	**70.171.200**
1.05.02.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional															
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan	**2**	Orang	4	106.755.210	6	71.225.818	8	87.171.200	10	70.171.200	12	70.171.200	12	70.171.200

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja														
Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga terdampak dari proses penegakan Perda dan Perkada	**Persentase keluhan dari warga terdampak penegakan Perda dan Perkada yang ditangani hingga tuntas**	**75**	**%**	**76**	**10.133.827**	**77**	**14.733.827**	**78**	**9.793.807**	**79**	**9.793.807**	**80**	**9.793.807**	**80**	**9.793.807**
1.05.02.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan															
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	**12**	Laporan	12	10.133.827	12	14.733.827	12	9.793.807	12	9.793.807	12	9.793.807	12	9.793.807
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada**	**84**	**%**	**85**	**1.146.253.915**	**86**	**1.109.894.013**	**87**	**1.204.329.381**	**88**	**1.215.512.897**	**89**	**1.415.602.862**	**90**	**1.415.602.862**
1.05.02.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum melalui pemantauan, analisis, dan pelaporan informasi secara cepat dan akurat	**Persentase penurunan jumlah gangguan ketertiban umum dibanding tahun sebelumnya**	**5**	**%**	**5**	558.824.100	**5**	734.858.200	**5**	690.779.200	**5**	771.480.200	**5**	955.175.488	**5**	955.175.488
1.05.02.01.005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia															
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasny**a**	**50**	Orang	50	295.790.000		378.790.000		390.740.100		385.740.100		477.587.744		477.587.744
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan															
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	**12**	Laporan	12	263.034.100	12	278.034.100	12	300.039.100	12	300.039.100	12	310.039.100	12	310.039.100
Meningkatnya penanganan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban umum secara cepat, akurat dan responsif	**Rata-rata waktu respon terhadap pengaduan masyarakat**	**3,5**	**Jam**	**3**	180.915.060	**2,5**		**2**	211.555.158	**1,5**	273.214.122	**1**	305.213.890	**1**	363.456.211
1.05.02.01.0023 Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum															
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	**2**	Dolumen	2	180.915.060	**2**	211.555.158	**2**	211.555.158	**2**	273.214.122	**2**	305.213.890	**2**	363.456.211

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.05.02.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota															
Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan yang edukatif dan partisipatif kepada masyarakat dalam rangka mendukung penegakan Perda dan Perkada	**Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah yang telah diberikan penyuluhan**	**10**	**%**	**10**	**85.000.000**	**10**	**95.000.000**	**10**	**90.821.272**	**10**	**75.005.020**	**10**	**85.005.020**	**10**	**85.005.020**
1.05.02.02.004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**12**	laporan	12	85.000.000	12	95.000.000	12	90.821.272	12	75.005.020	12	85.005.020	12	85.005.020
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya menaati Perda dan Perkada	**Persentase masyarakat yang memahami substansi Perda dan Perkada**	**79**		**80**	**321.514.755**	**81**	**146.514.755**	**82**	**149.514.787**	**83**	**149.514.787**	**84**	**179.514.787**	**84**	**179.514.787**
1.05.02.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**12**	Laporan	12	321.514.755	12	146.514.755	12	149.514.787	12	149.514.787	12	179.514.787	12	179.514.787
Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase penurunan pelanggaran Perda**	**77**		**78**	**1.176.977.062**	**79**	**1.214.566.552**	**80**	**1.205.640.396**	**81**	**1.091.776.316**	**82**	**1.188.503.409**	**83**	**1.188.503.409**
1.05.02.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya koordinasi dan sinergi yang efektif antar lembaga/instansi dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	**Persentase penurunan gangguan ketertiban umum di wilayah yang ditangani melalui operasi gabungan antar instansi**	**5**	**%**	**5**	**205.756.870**	**5**	**250.756.870**	**5**	**280.796.800**	**5**	**241.145.885**	**5**	**320.796.800**	**5**	**320.796.800**
1.05.02.02.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum															
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	**2**	Dokumen	2	205.756.870	2	250.756.870	2	280.796.800	2	241.145.885	2	320.796.800	2	320.796.800

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Ketentraman dan Ketertiban Umum															
1.05.02.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota															
Meningkatnya penyelesaian pelanggaran Perda yang memberikan efek jera	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti hingga tuntas sesuai ketentuan hukum**	**89**	**%**	**90**	**71.000.000**	**91**	**98.000.000**	**92**	**80.042.100**	**93**	**80.042.100**	**94**	**80.042.100**	**95**	**80.042.100**
1.05.02.02.0004 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**12**	Laporan	12	71.000.000	12	98.000.000	12	80.042.100	12	80.042.100	12	80.042.100	12	80.042.100
Meningkatnya kualitas operasi penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	**Rasio jumlah pelanggaran yang ditindak dibanding jumlah pelanggaran yang ditemukan**	**75**	**%**	**76**	**690.523.774**	**77**	**646.113.264**	**78**	**621.144.558**	**79**	**571.931.393**	**80**	**579.931.393**	**80**	**579.931.393**
1.05.02.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah															
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12	laporan	12	188.000.000	12	101.000.000	12	90.010.304	12	90.010.304	12	98.010.304	12	98.010.304
1.05.02.02.0011 Penanganan Atas															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP															
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Penanganan Atas pelanggaran Perda dan perkada sesuai SOP	**12**	**Laporan**	12	502.523.774	12	545.113.264	12	531.134.254	12	481.921.089	12	481.921.089	12	481.921.089
Meningkatnya koordinasi dan sinergi yang efektif antar lembaga/instansi dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	**Persentase penurunan gangguan ketertiban umum di wilayah yang ditangani melalui operasi gabungan antar instansi**	**5**	**%**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**	
1.05.02.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota															
Meningkatnya kompetensi PPNS dalam menegakkan Perda dan Perkada	**Persentase PPNS yang meningkat kompetensinya**	**24**		**25**	**209.696.418**	**50**	**219.696.418**	**75**	**223.656.938**	**80**	**198.656.938**	**85**	**207.733.116**	**85**	**207.733.116**
1.05.02.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah															
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	**1**	Laporan	1	83.175.000	1	48.175.000	1	49.185.200	1	44.185.200	1	53.261.378	1	53.261.378
1.05.02.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		Laporan	1	15.122.000	1	28.122.000	1	29.122.300	1	29.122.300	1	29.122.300	1	29.122.300
1.05.02.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS															
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		Laporan	2	111.399.418	2	143.399.418	2	145.349.438	2	125.349.438	2	125.349.438	2	125.349.438
Meningkatnya perlindungan masyarakat	**Meningkatnya perlindungan masyarakat**	**74**	**%**	**75**	**10.225.325.362**	**77**	**11.331.734.046**	**78**	**11.729.835.106**	**79**	**11.991.468.174**	**80**	**11.926.837.495**	**81**	**11.926.837.495**
1.05.02.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatkan partisipasi Linmas dalam kegiatan preventif dan responsif terhadap potensi gangguan masyarakat.	**Persentase keterlibatan Linmas dalam penanganan trantibum**	**20**	**%**	**20**	**925.000.000**	**21**	**995.088.794**	**22**	**999.037.053**	**23**	**1.000.037.15**	**24**	**1.000.091.151**	**25**	**1.000.091.151**
1.05.02.02.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan partisipasi Linmas dalam kegiatan preventif dan responsif terhadap potensi gangguan masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen	2	925.000.000	2	995.088.794	2	999.037.053	2	1.000.037.153	2	1.000.091.151	2	1.000.091.151
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini terkait keberadaan, kapasitas, dan aktivitas Satgas Daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan pemberdayaan	**Persentase data satlinmas yang terverifikasi dan mutakhir**	**89**	**%**	**90**	**8.819.084.940**	**91**	**9.788.444.842**	**92**	**10.153.439.410**	**93**	**10.451.072.378**	**94**	**10.394.387.701**	**95**	**10.394.387.701**
1.05.02.02.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum															
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Dokumen	**2**	8.819.084.940	2	9.788.444.842	2	10.153.439.410	2	10.451.072.378	2	10.394.387.701	2	10.394.387.701
Meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas anggota Linmas	**Persentase anggota Linmas yang memenuhi standar kesiapsiagaan fisik dan mental**	**85**	**%**	**86**	**481.240.422**	**87**	**548.200.410**	**88**	**577.358.643**	**89**	**540.358.643**	**90**	**532.358.643**	**90**	**532.358.643**
1.05.02.02.0013 Peningkatan Kapasitas SDM															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Satuan Perlindungan Masyarakat															
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	480	Orang	480	481.240.422	480	548.200.410	480	577.358.643	480	540.358.643	480	532.358.643	480	532.358.643
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang berhasil ditangani**	**100**	**%**	**100**	**1.137.093.979**	**100**	**1.494.736.304**	**100**	**1.637.245.288**	**100**	**1.653.245.056**	**100**	**1.669.283.660**	**100**	**1.669.283.660**
1.05.02.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya kualitas operasional penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mewujudkan ketentraman di masyarakat	**Persentase gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani hingga tuntas**	**89**	**%**	**90**	**320.525.166**	**91**	**390.525.166**	**92**	**400.525.166**	**93**	**400.525.166**	**94**	**400.525.166**	**94**	**400.525.166**
1.05.02.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		Laporan	12	320.525.166	12	390.525.166	12	400.525.166	12	400.525.166	12	400.525.166	12	400.525.166
Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban umum	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban**	**79**	**%**	**80**	**480.915.060**	**81**	**611.555.158**	**82**	**723.214.122**	**83**	**765.213.890**	**84**	**485.302.283**	**85**	**485.302.283**
1.05.02.01.0026 Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota															
Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**2**	Dokumen	2	480.915.060	2	611.555.158	2	723.214.122	2	765.213.890	2	783.456.211	2	783.456.211
Meningkatnya pengendalian penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota secara terkoordinasi, terukur, dan akuntabel	**Persentase aktivitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pelaksanaan Perda dan Perkada yang aman dan lancar**	**89**	**%**	**90**	**335.653.753**	**91**	**492.655.980**	**92**	**513.506.000**	**93**	**487.506.000**	**94**	**485.302.283**	**94**	**485.302.28**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TAHUN 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.05.02.01.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**12**	Laporan	12	335.653.753	12	492.655.980	12	513.506.000	12	487.506.000	12	485.302.283	12	485.302.283

X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**28.098.266.371**		**31.282.854.687**		**32.668.935.755**		**32.668.935.755**		**33.524.095.836**		**33.524.095.836**
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas**	**100**	**%**	**100**	**28.098.266.371**	**100**	**31.282.854.687**	**100**	**32.668.935.755**	**100**	**32.668.935.755**	**100**	**33.524.095.836**	**100**	**33.524.095.836**
X.XX.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**%**	**100**	**103.668.700**	**100**	**144.168.700**	**100**	**167.059.759**	**100**	**132.065.732**	**100**	**94.065.732**	**100**	**94.065.732**
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan**		**%**	**100**	**103.668.700**	**100**	**144.168.700**	**100**	**167.059.759**	**100**	**132.065.732**	**100**	**94.065.732**	**100**	**94.065.732**
X.XX.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					29.328.800		32.328.800		36.324.600		22.324.600		13.324.600		13.324.600
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	29.328.800	1	32.328.800	1	36.324.600	1	22.324.600	1	13.324.600	1	13.324.600
X.XX.01.2.01.0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.849.020		8.849.020		9.743.020		10.745.021		10.745.021		10.745.021
Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	5.849.020	1	8.849.020	1	9.743.020	1	10.745.021	1	10.745.021	1	10.745.021
X.XX.01.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					8.240.840		9.240.840		11.245.843		12.245.822		11.245.822		
Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	8.240.840	1	9.240.840	1	11.245.843	1	12.245.822	1	11.245.822	1	11.245.822
X.XX.01.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7.849.020		9.849.020		11.849.120		13.859.122		11.859.122		11.859.122
Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	7.849.020	1	9.849.020	1	11.849.120	1	13.859.122	1	11.859.122	1	11.859.122
X.XX.01.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					9.240.840		10.740.840		12.741.141		13.731.141		12.731.141		12.731.141
Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	9.240.840	1	10.740.840	1	12.741.141	1	13.731.141	1	12.731.141	1	12.731.141
X.XX.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23.160.180		48.160.180		57.156.035		39.160.026		29.160.026		29.160.026
Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3	23.160.180	3	48.160.180	3	57.156.035	3	39.160.026	3	29.160.026	3	29.160.026

	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15.039.760		38.039.760		40.035.710		21.034.711		14.034.711		14.034.711
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	15.039.760	4	38.039.760	4	40.035.710	4	21.034.711	4	14.034.711	4	14.034.711
	X.XX.01.2.01.0008 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					20.000.000		25.000.000		28.000.000		20.000.000		5.000.000		5.000.000
	Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	1	20.000.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	20.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**27.112.827.595**	**100**	**28.492.170.326**		**29.954.033.200**	**100**	**31.412.446.875**		**32.882.986.464**		**32.882.986.464**
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**27.112.827.595**	**100**	**28.492.170.326**	**100**	**29.954.033.200**	**100**	**31.412.446.875**	**100**	**32.882.986.464**	**100**	**32.882.986.464**
	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					27.006.854.620	266	28.357.197.351	266	29.775.057.219	266	31.263.810.079	266	32.827.000.583	266	32.827.000.583
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	Orang/ bulan	266	27.006.854.620	266	28.357.197.351	266	29.775.057.219	266	31.263.810.079	266	32.827.000.583	266	32.827.000.583
	X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					83.076.815		106.076.815		144.079.821		113.740.636		24.089.721		24.089.721
	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	83.076.815	12	106.076.815	12	144.079.821	12	113.740.636	12	24.089.721	12	24.089.721
	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.512.400		9.512.400		10.512.400		10.512.400		9.512.400		9.512.400
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	7.512.400	1	9.512.400	1	10.512.400	1	10.512.400	1	9.512.400	1	9.512.400
	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					8.071.360		10.071.360		14.071.360		14.071.360		12.071.360	12	12.071.360
	Tersedianya laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12	Laporan	12	8.071.360	12	10.071.360	12	14.071.360	12	14.071.360	12	12.071.360	12	12.071.360
	X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					7.312.400		9.312.400		10.312.400		10.312.400		10.312.400		10.312.400

	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	1	7.312.400	1	9.312.400	1	10.312.400	1	10.312.400	1	10.312.400	1	10.312.400
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja		**Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja**		**84**		**84,5**	**2.066.463.578**	**85**	**3.489.627.318**	**85,5**	**3.551.604.958**	**86**	**2.738.343.552**	**86,5**	**2.148.801.131**	**86,5**	**2.148.801.131**
	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**91.925.516**		**293.825.312**		**325.940.530**		**205.756.782**		**96.756.806**		**96.756.806**
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	**Nilai layanan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja**	**100**	**77**	**Angka**	**78**	**91.925.516**	**100**	**293.825.312**	**78**	**325.940.530**	**80**	**205.756.782**	**81**	**96.756.806**	**81**	**96.756.806**
	X.XX.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								26.020.104		65.000.000		67.000.000		47.000.000		17.000.000
	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Unit	4	26.020.104	4	65.000.000	4	67.000.000	4	47.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000
	X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						21.304.420		81.304.420		75.486.158		52.302.410		22.302.410		22.302.410
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	Paket	20	21.304.420	20	81.304.420	20	75.486.158	20	52.302.410	20	22.302.410	20	22.302.410
	X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
	X.XX.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						25.067.192		125.067.192		150.031.172		80.031.172		40.031.196		40.031.196
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450	Orang	80	25.067.192	80	125.067.192	80	150.031.172	80	80.031.172	80	40.031.196	80	40.031.196
	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						140.000.000		250.000.000		220.000.000		220.000.000		100.000.000		
	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	40	15.533.800	50	18.453.700	60	29.423.200	70	22.423.200	80	13.423.200	80	13.423.200
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100			**229.820.085**		**352.068.235**		**351.068.235**		**266.068.235**		**144.068.235**		**144.068.235**
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang	Persentase kinerja pelayanan administrasi	100		**%**	**100**	**229.820.085**	**100**	**352.068.235**	**100**	**351.068.235**	**100**	**266.068.235**	**100**	**144.068.235**	**100**	**144.068.235**

pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	umum dan penyediaan sarpras kantor Satuan Polisi Pamong Praja															
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.819.572		12.819.572		13.819.572		13.819.572		13.819.572		13.819.572
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	15	10.819.572	15	12.819.572	15	13.819.572	15	13.819.572	15	13.819.572	15	13.819.572
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						46.456.090		98.815.490		58.815.490		38.815.490		58.815.490		58.815.490
Tersedianya bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	60	46.456.090	60	98.815.490	60	58.815.490	60	38.815.490	60	58.815.490	60	58.815.490
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				31.682.820		32.236.870		35.236.870		33.236.870		15.236.870		15.236.870	Paket	
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	31.682.820	1	32.236.870	1	35.236.870	1	33.236.870	1	15.236.870	1	15.236.870	Paket	1
X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu						39.661.490		72.002.500		75.002.500		58.002.500		12.002.500		12.002.500
Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	39.661.490	12	72.002.500	12	75.002.500	12	58.002.500	12	12.002.500	12	12.002.500
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Laporan		75.819.445		88.813.135		93.813.135		67.813.135		27.813.135		27.813.135
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	75.819.445	12	88.813.135	12	93.813.135	12	67.813.135	12	27.813.135	12	27.813.135
X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						25.380.668		47.380.668		74.380.668		54.380.668		16.380.668		16.380.668
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	2	25.380.668	2	47.380.668	2	74.380.668	2	54.380.668	2	16.380.668	2	16.380.668
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**%**	**100**	**223.532.078**	**100**	**340.002.686**	**100**	**389.164.582**	**100**	**239.532.078**	**100**	**96.548.256**	**100**	**96.548.256**
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	100		**%**	**100**	**223.532.078**	**100**	**340.002.686**	**100**	**389.164.582**	**100**	**239.532.078**	**100**	**96.548.256**	**100**	**96.548.256**
X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						190.826.004		204.826.004		220.458.508		110.826.004		57.842.182		57.842.182
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	190.826.004	1	204.826.004	1	220.458.508	1	110.826.004	1	57.842.182	1	57.842.182
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000		20.000.000		20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000

	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	7.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
	X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.706.074		115.176.682		148.706.074		118.706.074		28.706.074		28.706.074
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	10	25.706.074	12	115.176.682	14	148.706.074	16	118.706.074	18	28.706.074	18	28.706.074
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**105.141.080**		**408.141.080**		**438.141.080**		**228.141.080**		**93.141.080**		**93.141.080**
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang selesai ditindaklanjuti**		**100**	**%**	**100**	**105.141.080**	**100**	**408.141.080**	**100**	**438.141.080**	**100**	**228.141.080**	**100**	**93.141.080**	**100**	**93.141.080**
	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.141.080		136.141.080		158.141.080		118.141.080		58.141.080		58.141.080
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	35.141.080	12	136.141.080	12	158.141.080	12	118.141.080	12	58.141.080	12	58.141.080
	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						70.000.000		272.000.000		280.000.000		110.000.000		35.000.000		35.000.000
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	12	70.000.000	12	272.000.000	12	280.000.000	12	110.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**231.351.317**		**1.252.478.348**		**1.043.528.369**		**439.528.369**		**116.529.263**		**116.529.263**
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan**	**100**		**%**	**100**	**231.351.317**	**100**	**1.252.478.348**	**100**	**1.043.528.369**	**100**	**439.528.369**	**100**	**116.529.263**	**100**	**116.529.263**
	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.603.603		72.003.643		44.053.642		44.053.642		14.053.642		14.053.642

	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	39.603.603	1	72.003.643	1	44.053.642	1	44.053.642	1	14.053.642	1	14.053.642
	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					101.558.530		774.288.531		594.288.553		124.288.553		27.288.553		27.288.553
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	45	101.558.530	45	774.288.531	45	594.288.553	45	124.288.553	45	27.288.553	45	27.288.553
	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.201.049		98.201.049		99.201.049		89.201.049		39.201.943		39.201.943
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	26	45.201.049	26	98.201.049	26	99.201.049	26	89.201.049	26	39.201.943	26	39.201.943
	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					23.848.785		96.848.785		70.848.785		56.848.785		10.848.785		10.848.785
	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	Unit	2	23.848.785	2	96.848.785	2	70.848.785	2	56.848.785	2	10.848.785	2	10.848.785

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dinilai melalui Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang. Target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan.

Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ini ditampilkan dalam sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	NIlai	76	77	78	79	80	81	DO **:** ukuran kuantitatif dalam skala 0–100 yang menunjukkan efektivitas pemerintah daerah (melalui Satpol PP) dalam menjaga kondisi masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Indeks dihitung berdasarkan data gangguan trantibum, efektivitas penanganan, kepatuhan masyarakat, dan persepsi publik. Rumus : (Skor Gangguan + Skor Penanganan + Skor Kepatuan + Skor Persepsi) / 4
2	Tingkat efektivitas penegakan peraturan daerah	%	75	76	77	78	79	80	DO : Perbandingan antara Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dengan Jumlah pengaduan pelanggaran Perda yang masuk yang dinyatakan dalam persentas Rumus : Jumlah pelanggaran perda yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran perda yang m

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	70	72	74	76	78	80	
3.	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,63	9,09	8,54	7,99	7,44	6,9	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Satuan Polisi pamong Praja Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Satpol PP Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Satpol PP Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Satpol PP Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satpol PP Kota semarang.

Permasalahan Masih rendahnya tingkat ketertiban, keamanan, dan keindahan wilayah dan stabilitas keamanan daerah sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Satpol PP Kota Semarang . Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Satpol PP Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Satpol PP Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Satpol PP Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Sehubungan hal tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renstra Damkar Kota Semarang juga perlu

memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri, serta Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Damkar, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Damkar Kota Semarang.

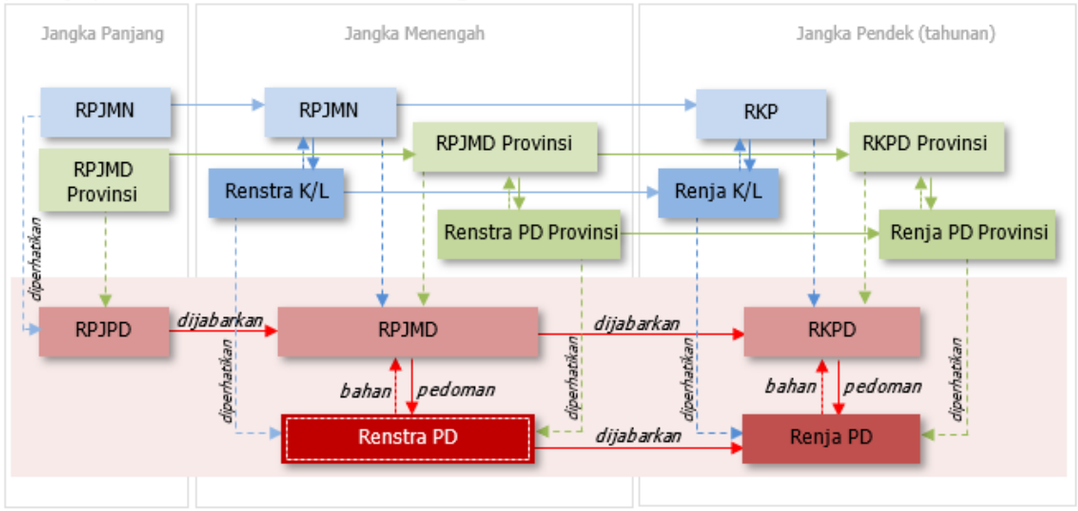

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal

serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Damkar beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Damkar secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 adalah:

a. Menjadi kerangka dasar bagi Damkar Kota Semarang dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Damkar;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Damkar Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Damkar Kota Semarang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Berisi gambaran pelayanan yang memuat tugas, fungsi, dan struktur, sumber daya, Kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok sasaran layanan pada Damkar Kota Semarang. Gambaran Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja, dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab pada Damkar Kota Semarang, serta permasalahan dan isu strategis Damkar Kota Semarang.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Berisi rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah Damkar Kota Semarang.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan termasuk kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, serta Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Damkar Kota Semarang.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Berkaitan dengan tugas, fungsi serta struktur organisasi yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang telah tertuang di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Di dalam regulasi ini, kedudukan dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang dalam tatanan pemerintahan daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Damkar Kota Semarang

Damkar Kota Semarang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk dapat mewujudkan tugas tersebut dengan optimal, maka Dinas Damkar Kota Semarang (Damkar) berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 menjalankan fungsi – fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.
2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD.
4) Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas.
5) Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD.
6) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas.
7) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dan UPTD.
8) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dan UPTD.
9) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk memastikan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang telah disusun secara struktural sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Komposisi

organisasi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang adalah sebagai berikut:

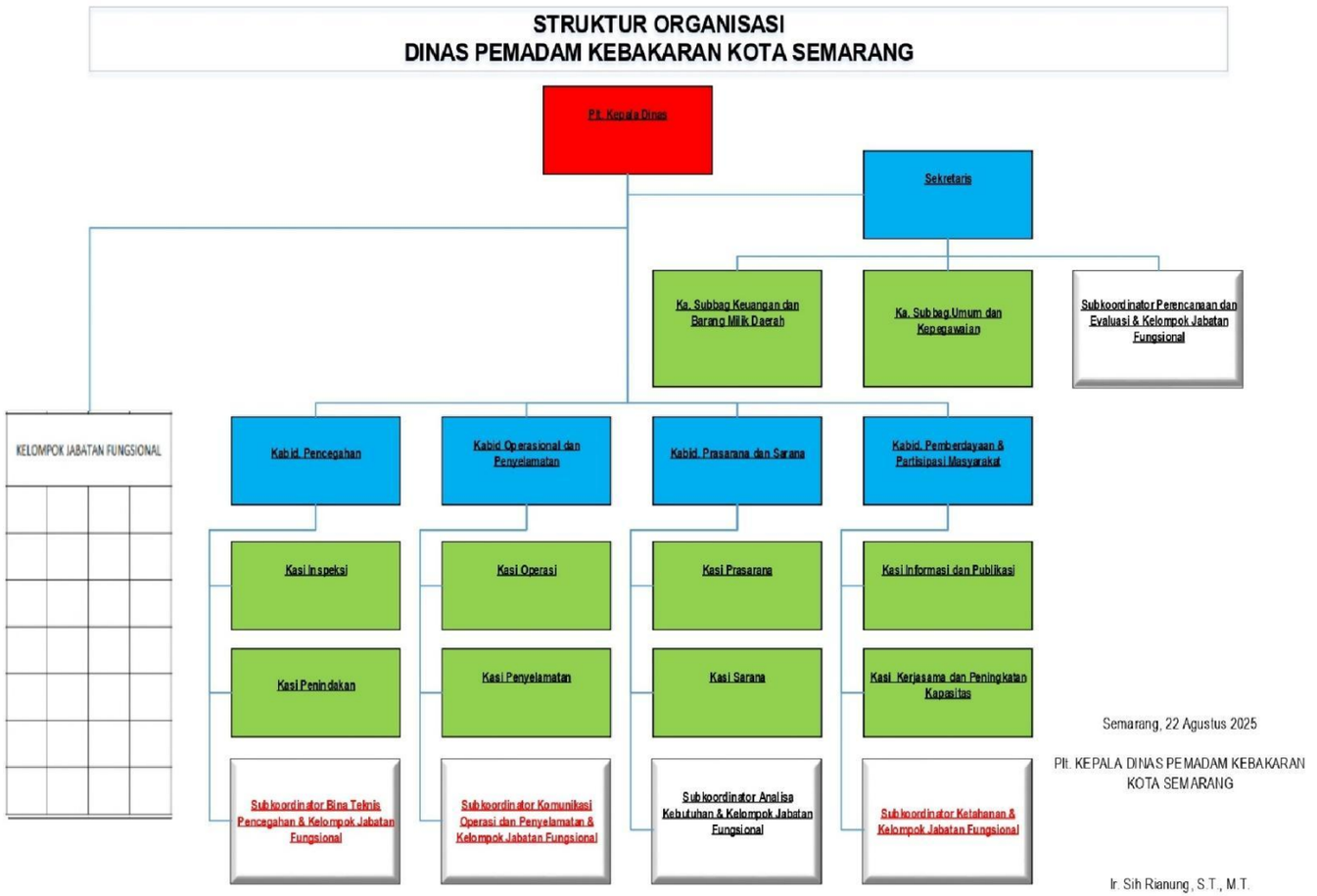

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang
Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas
   Kepala Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
2) Sekretariat
   Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sebagai pemimpin sekretariat, sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD. Seorang sekretaris juga diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
   Dalam menjalankan tugasnya seperti pada penjelasan di atas, sekretariat memiliki fungsi:
   a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
   d) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
   e) pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait;
   f) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Dinas;
   g) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
   h) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
   i) pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
   j) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
   k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
   l) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
   m) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;

n) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
o) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
p) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
q) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
r) pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
s) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
t) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
u) pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
v) pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
w) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
x) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
y) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
z) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat DAMKAR Kota Semarang terdiri atas:

a) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah (dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris)

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;

- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian (dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris)

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
- menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasdan fungsinya.

c) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi (pelaksana fungsi dan kegiatan perencanaan dan evaluasi, dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris)
- Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
- menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Tugas dari Kepala Bidang Pencegahan dan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Inspeksi, Penindakan, dan Bina Teknis Pencegahan. Kepala bidang juga diberi tugas tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pencegahan;
e) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;

f) pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;
g) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi kajian teknis keselamatan kebakaran bangunan gedung;
h) pelaksanaan kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan bangunan gedung;
i) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran atau penyalahgunaan perizinan dan non perizinan;
j) pelaksanaan kegiatan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
k) pelaksanaan kegiatan monitoring kondisi peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung baru dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dalam masa pembinaan;
l) pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
m) pelaksanaan kegiatan perancangan keselamatan kebakaran bangunan Gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
n) pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan perencanaan bangunan gedung;
o) pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
p) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pencegahan;
q) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pencegahan;
r) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pencegahan; dan
s) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan terdiri atas:
a) Seksi Inspeksi
   Seksi Inspeksi mempunyai tugas:
   - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Inspeksi;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Inspeksi;
   - menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
   - menyiapkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;

- menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi kajian teknis keselamatan kebakaran bangunan gedung;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Inspeksi;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Inspeksi;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Inspeksi; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya fungsinya.

b) Seksi Penindakan
Seksi Penindakan mempunyai tugas:
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penindakan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penindakan;
- menyiapkan kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan bangunan gedung;
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran atau penyalahgunaan perizinan dan non perizinan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
- menyiapkan kegiatan monitoring kondisi peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung baru dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dalam masa pembinaan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penindakan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penindakan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penindakan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Bina Teknis Pencegahan
Subkoordinator Bina Teknis Pencegahan mempunyai tugas:
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bina Teknis Pencegahan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Bina Teknis Pencegahan;
- menyiapkan kegiatan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;

- menyiapkan kegiatan perancangan keselamatan kebakaran bangunan Gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- menyiapkan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan perencanaan bangunan gedung;
- menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Bina Teknis Pencegahan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Bina Teknis Pencegahan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bina Teknis Pencegahan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Bidang Operasional dan Penyelamatan
Bidang Operasional dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Operasi, Penyelamatan, dan Komunikasi Operasi dan Penyelamatan. Dalam hal ini, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan juga mengemban tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
e) pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan kesigapan pegawai sebagai petugas pelaksanaan operasi pemadaman;
f) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan operasi pemadaman;
g) pelaksanaan kegiatan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
h) pelaksanaan kegiatan pengendalian unit-unit operasional, pos cabang pembantu, unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
i) pelaksanaan kegiatan penyusunan saran tindak, taktik dan strategi operasi;
j) pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi data hasil pengujian di laboratorium maupun pengamatan di lapangan;
k) pelaksanaan kegiatan simulasi skenario investigasi kebakaran dan menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil investigasi;

l) pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bangunan, air, ketinggian, bahan-bahan berbahaya bencana dan bantuan layanan medis darurat ambulans;
m) pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan operasi penyelamatan;
n) pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiapsiagaan dan kesigapan petugas penyelamatan;
o) pelaksanaan kegiatan simulasi penyelamatan pada Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
p) pelaksanaan kegiatan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
q) pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pengendalian jalur komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
r) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
s) pelaksanaan kegiatan menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
t) pelaksanaan kegiatan kerja sama dan kemitraan pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
u) pelaksanaan kegiatan jejaring kerja dalam rangka efektivitas penyelidikan kebakaran;
v) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
w) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
x) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Operasional dan Penyelamatan; dan
y) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Operasional dan Penyelamatan terdiri atas:

a) Seksi Operasi

Seksi Operasi mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Operasi;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Operasi;
- menyiapkan kegiatan kesiapsiagaan dan kesigapan pegawai sebagai petugas pelaksanaan operasi pemadaman;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan operasi pemadaman;
- menyiapkan kegiatan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- menyiapkan kegiatan pengendalian unit-unit operasional, pos cabang pembantu, unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan penyusunan saran tindak, taktik dan strategi operasi;
- menyiapkan kegiatan analisis dan evaluasi data hasil pengujian di laboratorium maupun pengamatan di lapangan;
- menyiapkan kegiatan simulasi skenario investigasi kebakaran dan menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil investigasi;

- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Operasi;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Operasi;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Penyelamatan

Seksi Penyelamatan mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bangunan, air, ketinggian, bahan-bahan berbahaya bencana dan bantuan layanan medis darurat ambulans;
- menyiapkan kegiatan pemberian bantuan operasi penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pembinaan kesiapsiagaan dan kesigapan petugas penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan simulasi penyelamatan pada Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelamatan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Komunikasi Operasi dan Penyelamatan

Subkoordinator Komunikasi Operasi dan Penyelamatan mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pengaturan dan pengendalian jalur komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- menyiapkan kegiatan menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan kerja sama dan kemitraan pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan jejaring kerja dalam rangka efektivitas penyelidikan kebakaran;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Prasarana, Sarana, dan Analisa Kebutuhan. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana juga memiliki amanat untuk mengemban tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana;
e) pelaksanaan kegiatan penyusunan standardisasi prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
f) pelaksanaan kegiatan penyusunan Detail Engineering Desain, rencana pembangunan dan rencana rehabilitasi total prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
h) pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
i) pelaksanaan kegiatan penyusunan standarisasi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
j) pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
l) pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

m) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
n) pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pengendalian penggunaan kendaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
o) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan distribusi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
p) pelaksanaan kegiatan penyusunan analisa kebutuhan prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
q) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian standar operasional pengelolaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
r) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tingkat kecukupan, kelaikan dan ketepatan penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
s) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kelaikan prasarana dan sarana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
t) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Prasarana dan Sarana;
u) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Prasarana dan Sarana;
v) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana; dan
w) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:
a) Seksi Prasarana
Seksi Prasarana mempunyai tugas:
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Prasarana;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Prasarana;
- menyiapkan kegiatan penyusunan standardisasi prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Detail Engineering Desain, rencana pembangunan dan rencana rehabilitasi total prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Prasarana;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Prasarana;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Sarana
Seksi Sarana mempunyai tugas:
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Sarana;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Sarana;
- menyiapkan kegiatan penyusunan standarisasi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pengaturan dan pengendalian penggunaan kendaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan distribusi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Sarana;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Sarana;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Analisa Kebutuhan
Subkoordinator Analisa Kebutuhan mempunyai tugas:
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Analisa Kebutuhan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Analisa Kebutuhan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan analisa kebutuhan prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kajian standar operasional pengelolaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan pemeriksaan tingkat kecukupan, kelaikan dan ketepatan penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kajian kelaikan prasarana dan sarana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Analisa Kebutuhan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Analisa Kebutuhan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Analisa Kebutuhan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Informasi dan Publikasi, Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas, dan Ketahanan. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat juga memiliki amanat untuk mengemban tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi:
   a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
   e) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
   f) pelaksanaan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
   g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan website dan media sosial Dinas;
   h) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi Dinas;
   i) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan publikasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
   j) pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas;
   k) pelaksanaan kegiatan rencana kebutuhan sumberdaya aparatur pemadam kebakaran;
   l) pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi petugas kebakaran;
   m) pelaksanaan kegiatan kerja sama pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi aparatur pemadam kebakaran;
   n) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
   o) pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis petugas pemadam dan penyelamatan;
   p) pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
   q) pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem keselamatan kebakaran dan

bencana yang berbasis lingkungan dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;

r) pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran;
s) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
t) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
u) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat; dan
v) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

a) Seksi Informasi dan Publikasi
   Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas:
   - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Informasi dan Publikasi;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Informasi dan Publikasi;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
   - menyiapkan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
   - menyiapkan kegiatan pengelolaan website dan media sosial Dinas;
   - menyiapkan kegiatan pengelolaan dokumentasi Dinas;
   - menyiapkan kegiatan pelaksanaan publikasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Informasi dan Publikasi;
   - menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Informasi dan Publikasi;
   - menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Publikasi; dan
   - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas
   Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:
   - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas;

- menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas;
- menyiapkan kegiatan rencana kebutuhan sumberdaya aparatur pemadam kebakaran;
- menyiapkan kegiatan penyusunan standar kompetensi petugas kebakaran;
- menyiapkan kegiatan kerja sama pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi aparatur pemadam kebakaran;
- menyiapkan kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- menyiapkan kegiatan bimbingan teknis petugas pemadam dan penyelamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Ketahanan
Seksi Ketahanan mempunyai tugas:
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ketahanan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Ketahanan;
- menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem keselamatan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- menyiapkan kegiatan pembentukan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Ketahanan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Ketahanan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Ketahanan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Sumber daya pada instansi mencakup semua aset yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan menjalankan operasinya. Ini tidak hanya terbatas pada aset fisik seperti gedung, peralatan, dan teknologi,

tetapi juga mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan informasi. Sumber daya manusia adalah komponen kunci dalam sumber daya organisasi, yang meliputi karyawan, manajemen, dan staf lainnya yang memberikan kontribusi pada operasi sehari-hari dan pertumbuhan jangka panjang.

Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya seperti keuangan, termasuk modal dan aset keuangan lainnya, juga krusial dalam menjalankan operasi bisnis. Informasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, juga merupakan sumber daya yang penting, karena memberikan wawasan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pengelolaan semua sumber daya ini dengan efektif menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan dan keberlanjutan organisasi di pasar yang kompetitif. Dengan memahami dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, instansi atau badan usaha dapat mencapai efisiensi operasional, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks instansi atau badan usaha mengacu pada semua individu yang bekerja di dalamnya dan merupakan aset paling berharga yang dimiliki organisasi. SDM tidak hanya mencakup karyawan yang menjalankan tugas-tugas operasional sehari-hari, tetapi juga manajemen dan staf lainnya yang memainkan peran penting dalam kesuksesan organisasi. Peran SDM mencakup pengelolaan proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, serta pengelolaan kebijakan dan budaya organisasi yang memengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan.

Pentingnya SDM dalam instansi atau badan usaha tidak bisa diabaikan, karena mereka merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang efektif menjadi prioritas utama bagi manajemen untuk memastikan bahwa organisasi dapat bersaing secara efektif di pasar dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Dinas Pemadam Kebakaran hingga bulan Juni tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak 334 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas pegawai Dinas Pemadam kebakaran berpendidikan SMA/Sederajat. Tercatat sebanyak 251 orang atau sebesar 75,15% merupakan pegawai berpendidikan SMA/Sederajat, sisanya sebayak 22 pegawai (6,59%) berpendidikan D3, sebanyak 55 orang (16,47%) berpendidikan S1, dan sebanyak 6 orang (1,80%) berpendidikan S2. Informasi mengenai kualifikasi pendidikan dari sumber daya manusia yang tergabung dalam Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dapat ditemukan dalam gambar berikut.

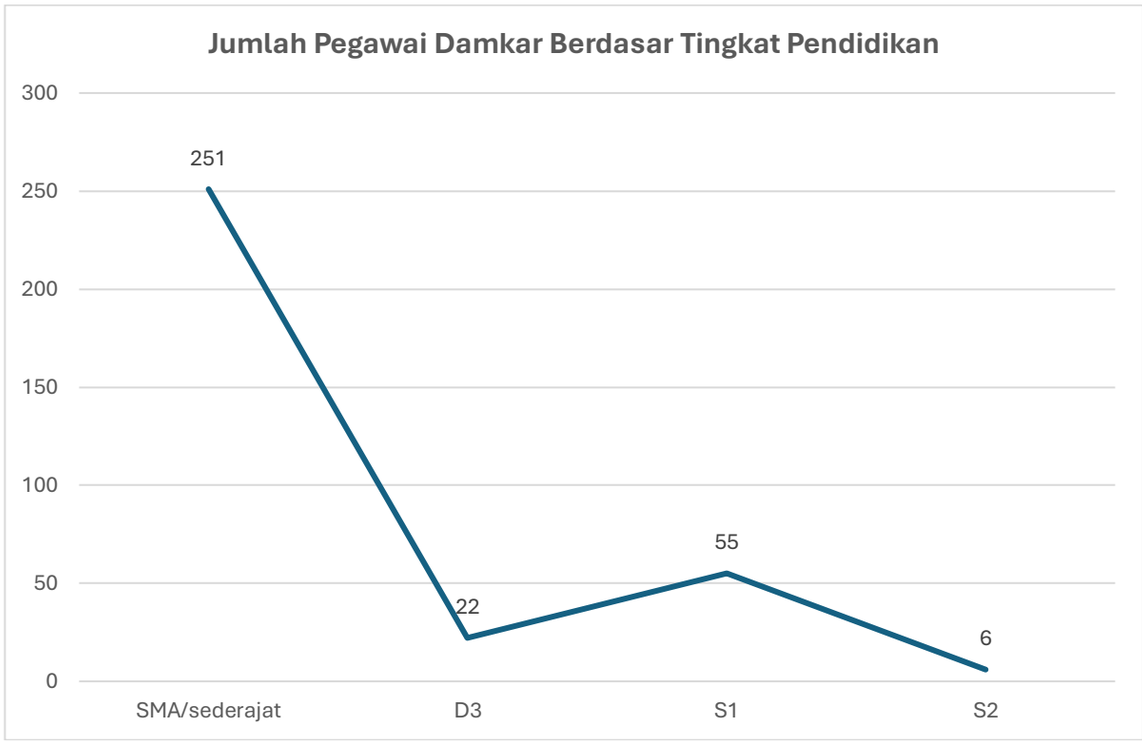

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Gambar 2. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025

Selanjutnya dari total 334 orang pegawai sebanyak 306 orang pegawai atau sebesar 91,62% merupakan pegawai dengan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan sisanya sebanyak 28 orang pegawai atau 8,38% merupakan pegawai dengan jenis kelamin perempuan. Tingginya pegawai berjenis kelamin laki-laki dikarenakan adanya resiko yang tinggi dalam pecegahan, dan penanganan kebakaran, sehingga membutuhkan tenaga fisik yang cenderung lebih kuat dan sigap. Meskipun demikian, dengan menjunjung tinggi konsep kesetaraan gender dalam pembangunan, Dinas Pemadam Kebakaran tetap memberikan peluang yang sama dalam peningkatan kapasitas SDM. Secara rinci data jumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan tingkat Pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI			
		PNS	PPPK	ALIHDAYA	JUMLAH
1	SD Sederajat	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	30	175	46	251
4	D3	1	21	0	22
5	S1	14	41	0	55
6	S2	6	0	0	6
7	S3	0	0	0	0
		51	237	46	334

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Berdasarkan tingkat eselon yang merupakan bentuk status tingkatan pangkat seorang ASN atau PNS dalam jabatan struktural, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Dinas Pemadam Kebakaran merupakan pegawai PPPK sebanyak 237 orang. Sebanyak 51 pegawai merupakan pegawai ASN dan 46 pegawai merupakan pegawai Non ASN. Terdiri dari 1 orang pegawai merupakan Eselon III.a, 4 orang pegawai merupakan Eselon III.b, sebanyak 8 orang pegawai merupakan Eselon IVa, 222 orang pegawai Non Eselon (36 orang PNS dan 186 PPPK), Tidak ada pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 53 orang (2 PNS dan 51 PPPK), serta 46 orang pegawai merupakan pegawai Non Golongan (Alihdaya). Secara rinci gambaran pegawai Dinas Pemadam Kebakaran menurut tingkat eselonnya dapat dilihat pada gambar berikut.

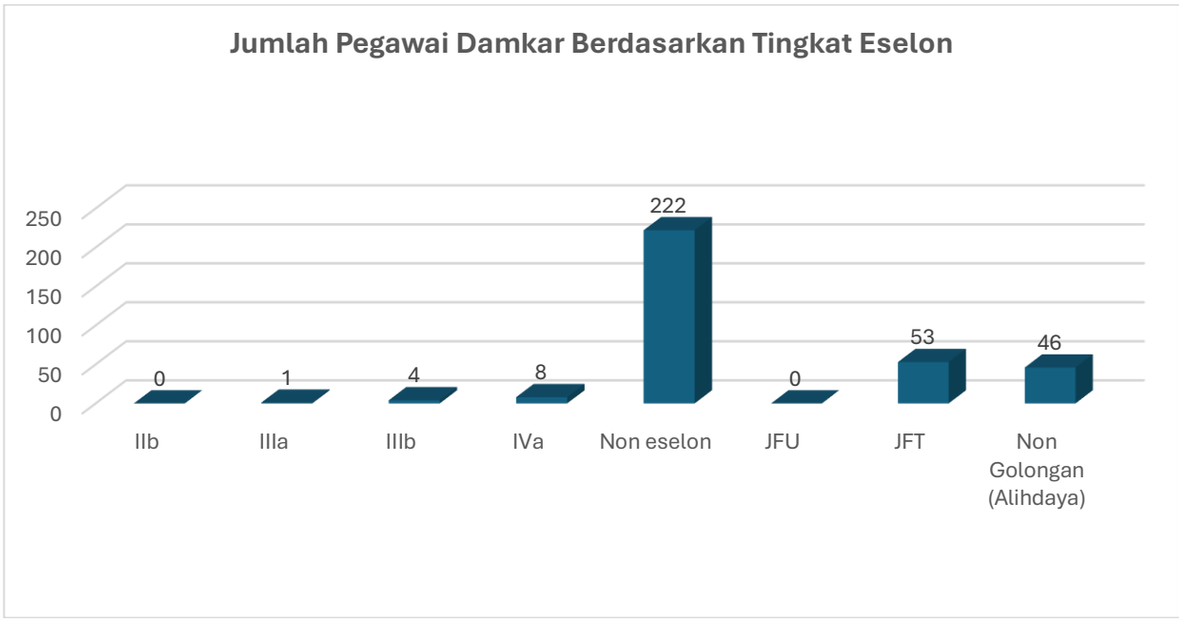

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Gambar 2. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Eselon di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025

Lebih lanjut, ditinjau dari kualifikasi golongan/ruang mayoritas pegawai Dinas Pemadam Kebakaran merupakan pegawai ASN yang terdiri dari PNS, PPPK dan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP). Sebanyak 4 orang PNS golongan IV, 37 orang merupakan PNS golongan III, 10 orang merupakan PNS golongan II, 41 orang PPPK golongan IX, 21 orang PPPK golongan VII, 175 orang PPPK golongan V, dan 46 orang tenaga PJLP (non golongan). Secara rinci kualifikasi golongan pegawai Damkar Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	ESELON	GOLONGAN							NON GOL.	JUMLAH
		PNS				PPPK				
		IV	III	II	I	IX	VII	V		
1	II b									0
2	III a		1							1
3	III b	3	1							4

NO	ESELON	GOLONGAN							NON GOL.	JUMLAH
		PNS				PPPK				
		IV	III	II	I	IX	VII	V		
4	IV a	1	7							8
5	Non Eselon (JFU, JFT)		28	10		41	21	175		275
6	Alihdaya								46	46
		4	37	10	0	41	21	175	46	334

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Sebagai sumber daya yang dituntut untuk cekatan dalam pencegahan maupun penanganan bencana kebakaran pegawai Dinas Pemadam Kebakaran juga senantiasa diberikan pelatihan sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM. Dari 334 orang Pegawai terdapat 247 orang pegawai atau 73,95% telah memiliki Pendidikan ketrampilan. Beberapa ketrampilan yang dimiliki antara lain ketrampilan montir mobil, inspektur, pemadam kebakaran, dan operator. Seluruh Pendidikan keterampilan yang diikuti dan dimiliki oleh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran merupakan ketrampilan yang penting dalam menunjang kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran di Kota Semarang. Secara rinci data jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan ketrampilan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Ketrampilan Tahun 2025

NO	ESELON	PENDIDIKAN KETRAMPILAN
1	II b	
2	III a	
3	III b	1 Orang Montir mobil
4	IV a	2 Orang Inspektur I
5	Non Eselon (JFT dan JFU)	196 Orang Pemadam Kebakaran I; 1 Orang Operator; 1 Orang Inspektur I
6	Non Golongan	46 Orang Pemadam Kebakaran I
Jumlah		247

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, per Juni 2025

2) Sumber Daya Aset

Sumber daya sarana dan prasarana dalam konteks instansi atau badan usaha merujuk pada infrastruktur fisik, fasilitas, dan peralatan yang digunakan untuk mendukung operasi dan kegiatan organisasi. Ini meliputi berbagai elemen seperti gedung kantor, pabrik, gudang, fasilitas produksi, jaringan komunikasi, perangkat keras komputer, peralatan teknis, dan fasilitas transportasi. Sumber daya ini merupakan fondasi penting bagi keberhasilan operasional organisasi, karena mereka memberikan lingkungan yang memadai untuk karyawan bekerja, menyimpan atau memproses barang atau informasi, serta menyalurkan produk atau layanan kepada pelanggan.

Sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia di Dinas Pemadam Kebakaran berasal dari APBD dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Perkantoran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	A.C. Split	11	√	
2	A.C. Window	1	√	
3	Acces Point	1	√	
4	Alat Kantor Lainnya	1	√	
5	Alat Penghancur Kertas	1	√	
6	Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	2	√	
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	√	
8	Alat Studio Lainnya	2	√	
9	Bangku Tunggu	2	√	
10	Brandkas	1	√	
11	Camera Film	2	√	
12	Clipp On	1	√	
13	DC Power Supply	1	√	
14	Dispenser	5	√	
15	Facsimile	1	√	
16	Filing Cabinet Besi	5	√	
17	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	√	
18	Hub	1	√	
19	Karpet	1	√	
20	Kasur/Spring Bed	1	√	
21	Kipas Angin	4	√	
22	Kitchen Set	1	√	
23	Komputer Jaringan lainnya	1	√	
24	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	√	
25	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	√	
26	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	√	
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	√	
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	√	
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	√	
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	√	
31	Kursi Putar	2	√	
32	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	2	√	
33	Lap Top	9	√	
34	Layar Film/Projector	3	√	
35	Layar Proyektor	1	√	
36	LCD Projector/Infocus	4	√	
37	Lemari Es	2	√	
38	Lemari Kaca	2	√	
39	Lemari Kayu	8	√	
40	Loudspeaker	3	√	
41	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	√	
42	Meja 1/2 Biro	3	√	
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	√	
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√	
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	√	
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	√	
47	Meja Ketik	1	√	
48	Meja Komputer	3	√	
49	Meja Rapat	3	√	
50	Meja Resepsionis	1	√	
51	Meja Tamu Biasa	3	√	
52	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	√	
53	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	√	
54	Meja Telepon	1	√	
55	Mesin Absen (Time Recorder)	2	√	
56	Mesin Absensi	1	√	
57	Mesin Cuci	1	√	
58	Mesin Fotocopy Folio	1	√	
59	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	6	√	
60	Mobil Workshop	1	√	
61	Note Book	4	√	
62	Overhead Projector	3	√	
63	P.C Unit	16	√	
64	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	1	√	

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
65	Personal Computer	2	√	
66	Personal Komputer lainnya	2	√	
67	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	7	√	
68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	√	
69	Radio	1	√	
70	Rak Besi	2	√	
71	Rak Kayu	2	√	
72	Repeater and Transciever	1	√	
73	Router	1	√	
74	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	√	
75	Sepeda Motor	15	√	
76	Sound System	5	√	
77	Telephone Mobile	2	√	
78	Televisi	10	√	
79	Tempat Tidur Kayu	4	√	
80	Tustel	9	√	
81	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	√	
82	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	1	√	
83	Unit Power Supply	1	√	
84	White Board	1	√	
85	Wireless Amplifier	1	√	
86	Administrasi, Pertahanan dan Keamanan	2	√	
87	Agama Islam	8	√	
88	Barang Kerajinan Lain-lain	1	√	
89	Biografi	15	√	
90	Biologi, Antropologi	2	√	
91	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya (dst)	1	√	
92	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	2	√	
93	Buku Umum Lain-lain	87	√	
94	Ekonomi	16	√	
95	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	23	√	
96	Hukum	37	√	
97	Ilmu Pengetahuan Umum	47	√	
98	Ilmu Politik	43	√	
99	Industri Kimia	1	√	
100	Kimia	6	√	
101	Management dan Perkantoran	8	√	
102	Peta (Map)	3	√	
103	Sejarah	1	√	
104	Service Umum Sosial	1	√	
105	Sosiologi	1	√	
106	Teknik Industri dan Kerajinan	1	√	
107	Teknologi	33	√	
108	Umum	3	√	

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Selain sarana dan prasarana perkantoran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang juga dituntut memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang prima, sehingga dapat mendukung kinerja pemadaman kebakaran yang responsive dan cepat. Berikut data asset sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran berasal dari APBD:

Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya (dst)	2	√	
2	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya (dst)	2	√	
3	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1	√	

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
4	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya (dst)	9	√	
5	Alat Pelencur Kebakaran	1	√	
6	Alat Pelindung Lainnya (dst)	1	√	
7	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	20	√	
8	Alat Pemadam/Portable	10	√	
9	Alat Pembantu Kebakaran	23	√	
10	Alat Pengukur Cahaya	1	√	
11	Alat Pengukur Temperatur	1	√	
12	Alat Peraga Pelatihan Lainnya (dst)	1	√	
13	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	3	√	
14	Alat Ukur Lainnya (dst)	3	√	
15	Alat Ukur Universal Lainnya (dst)	1	√	
16	Anemometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	1	√	
17	Antene VHF/FM Portable	1	√	
18	Antene VHF/FM Stationary	5	√	
19	Baju Anti Panas	1	√	
20	Baju Pengaman Lainnya (dst)	2	√	
21	Detector	1	√	
22	Detektor Kebakaran	9	√	
23	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	1	√	
24	Digital Tang Ampere	1	√	
25	Gas Detector	1	√	
26	Gergaji	1	√	
27	Gergaji Chain Saw	1	√	
28	Grinder Machine	1	√	
29	Handy Cam	2	√	
30	Handy Talky (HT)	18	√	
31	Hidran Kebakaran	1	√	
32	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)	3	√	
33	Linggis	1	√	
34	Lonceng Kebakaran	1	√	
35	Megaphone	1	√	
36	Mesin Kompresor	2	√	
37	Mesin Pemotong Rumput	1	√	
38	Meubeleur lainnya	4	√	
39	Mobil Pemadam Kebakaran	28	√	√
40	Moister Meter	1	√	
41	Pakaian Panas/Lengkap	20	√	
42	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	√	
43	Peralatan Las Karbit	1	√	
44	Peralatan Las Listrik	1	√	
45	Peralatan Tukang Besi Lainnya (dst)	1	√	
46	Perkakas Bengkel Service Lainnya (dst)	7	√	
47	Perkakas Pengangkat Lainnya (dst)	1	√	
48	Perlengkapan Rescue	7	√	
49	Pompa Air	5	√	
50	Pompa Kebakaran/Portable	7	√	
51	Pompa Portable	2	√	

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
52	Sarung Tangan Pelindung	2	√	
53	Senter Mini Standar Safety	1	√	
54	Smoke Detecting System & Alarm	1	√	
55	Soun Level Meter Tester	1	√	
56	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	1	√	
57	Station Wagon	5	√	
58	Stopwatch	1	√	
59	Tali Kamantel Dinamic	1	√	
60	Tali Kamantel Static	1	√	
61	Tandu Lipat	1	√	
62	Tangga Aluminium	3	√	
63	Tangki Air	1	√	
64	Timbangan Pegas Capasitas 50 Kg (Alat Timbangan/Biara)	1	√	
65	Tool Kit Set	1	√	
66	Topeng (Masker) Gas	6	√	
67	Topeng (Masker) Oxigen	7	√	
68	Track Loader + Attachment	2	√	
69	Unit Tranceiver FM	20	√	
70	Unit Tranceiver VHF Portable	1	√	

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Secara rinci data sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan kebakaran juga diperlukan Kendaraan Operasional pemadaman kebakaran yang dalam kondisi prima, namun berdasarkan inventarisasi bidang prasarana dan sarana masih terdapat beberapa kendaraan operasional pemadam kebakaran yang tidak layak pakai. Berikut kondisi kendaraan operasional pemadam kebakaran Kota Semarang hingga tahun 2025.

Tabel 2. 6 Identifikasi Kondisi Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Jumlah Kendaraan	Total	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	17	14	1	2
Jumlah Mobil Rescue	1	1		
Jumlah Mobil Tangga	1			1
Jumlah Mobil Supply	3	2		1
Jumlah Mobil Pompa	1	1		
Jumlah Mobil Lighting	1	1		
Jumlah Motor Pemadam	1	1		
Jumlah Pompa Portable	8	7		1
Jumlah Pompa Apung	4	3		1

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Tabel 2.7 Rincian Kondisi Sarana dan Prasarana Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

NO	JENIS KENDARAAN		NO LAMBUNG	NO POLISI / JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS	KONDISI
Kendaraan Operasional Mobil Tangga							
1	Mobil Tangga		11	H 9596 UH	1992		RUSAK BERAT
Kendaraan Operasional Roda 10							
1	Tangki Isuzu		26	H 9588 KA	2008	12.000 LITER AIR	RUSAK BERAT
Kendaraan Operasional Roda 6							
1	Tangki Isuzu		08	H 9592 PS/ H 8290 XA	2011	3.000 LITER AIR	BAIK
2	Tangki Isuzu		09	H 9593 PS /H8291 XA	2011	3.000 LITER AIR	BAIK
3	PMK Hino		15	H 9533 VS	2014	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	RUSAK BERAT
4	PMK Hino		16	H 9554 VS	2014	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK

NO	JENIS KENDARAAN		NO LAMBUNG	NO POLISI / JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS	KONDISI
5	PMK Hino		20	H 9585 TS	2014	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK
6	PMK Hino		21	H 9599 RS	2014	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK
7	PMK Hino		29	H 9598 RS	2014	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK
8	PMK Hino		30	H 9597 RS	2014	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	RUSAK BERAT
9	PMK Hino		31	H 9539 YS/ H 8122 XA	2015	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK
10	PMK Hino		32	H 9535 YS/ H 8117 XA	2015	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK

NO	JENIS KENDARAAN		NO LAMBUNG	NO POLISI / JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS	KONDISI
11	PMK Hino		33	H 9537 YS / H 8120 XA	2015	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK
12	PMK Hino		34	H 9538 YS / H 8121 XA	2015	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	RUSAK RINGAN
13	PMK Hino		35	H 9536 YS/ H 8119 XA	2015	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK
14	PMK Hino		36	H 9541 YS / H 8124 XA	2015	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK
15	PMK Hino		37	H 9540 YS / H 8123 XA	2015	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK
16	PMK Hino		38	H 9542 YS / H 8125 XA	2015	5000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK

NO	JENIS KENDARAAN		NO LAMBUNG	NO POLISI / JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS	KONDISI
17	PMK Mitsubishi		39	H 9597 VS/ H 8266 XA	2016	3000 LITER AIR	BAIK
18	PMK Mitsubishi		40	H 9545 A / H 8403 XA	2017	3000 LITER AIR	BAIK
19	PMK Hino		41	H 8637 XA	2024	3000 LITER AIR 500 LITER FOAM	BAIK
Kendaraan Operasional Rescue							
1	Mobil Rescue		42	H 8645 XA	2024		BAIK
Kendaraan Operasional Roda Dua							
1	Motor Pemadam Kawasaki			H 6684 XF	2022		BAIK
Kendaraan Operasional Pendukung Roda Empat							

NO	JENIS KENDARAAN		NO LAMBUNG	NO POLISI / JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS	KONDISI
1	Mobil Storing (Hilux)			H 9573 ZS	2014		BAIK
2	Mobil Pompa		27	H 9594 KA	2009		BAIK
3	Mobil Peralatan dan Lighting		28	H 9686 MA / H 8140 XA	2010		BAIK
4	Elf			H 9510 WS	2013		RUSAK RINGAN
POMPA PORTABLE / POMPA APUNG							
1	POMPA PORTABLE ZIEGLER			1	2010		RUSAK BERAT
2	POMPA PORTABLE TOHATSU			3	2014-2023		RUSAK BERAT = 1 BAIK = 2

NO	JENIS KENDARAAN	NO LAMBUNG	NO POLISI / JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS	KONDISI
3	POMPA APUNG		2	2013		BAIK = 1 RUSAK BERAT = 1
4	POMPA APUNG (KOHLER)		5	2024		BAIK
5	POMPA APUNG (KAWASAKI)		2	2024		BAIK

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Dari data inventarisasi kendaraan operasional pemadam kebakaran menunjukan bahwa masih perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kendaraan operasional pemadam kebakaran untuk dapat mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran yang prima dan cepat. Hal ini menjadi catatan khusus dalam penentuan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran di 5 tahun yang akan datang.

Selain pada inventarisasi sarana dan prasarana milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, peninjauan aset dinas juga dilakukan pada aset tanah dan bangunan yang dimiliki. Berikut merupakan tabel aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Tabel 2. 8 Gedung dan Bangunan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

JENIS BARANG	KONDISI	LUAS LANTAI (m^2)	ALAMAT	STATUS	ASAL
Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Baik	8.813	Jl. Madukoro No. 6 Semarang	Milik Pemkot	APBD
Pos Pembantu Cab.Plamongan	Baik	179	Jl. Kelapa Gading Plamongan Plamongan Sari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192	Milik Pemkot	APBD
Pos Pembantu Cab.Banyumanik	Baik	271	Pd. Bukit Agung, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269	Milik Pemkot	APBD
Pos Gunungpati	Baik	100	Jl Raya Gunung Pati, Pelalangan Kec Gunung Pati	Milik Pemkot	APBD
Pos Tugu/Ngaliyan	Baik	299	Jl. Walisongo No.82, Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah	Milik Pemkot	APBD
Pos Genuk	Baik	299	Jl. Terboyo Industri Timur, Trimulyo, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah	Milik Pemkot	APBD
Pos Semarang Timur/ Barito	Baik	112,5	Jl. Brantas Raya, Rejosari, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah	Milik Pemkot	APBD

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Dari data tersebut menunjukan bahwa hanya terdapat 6 pos dan 1 pos induk (kantor dinas) yang memberikan pelayanan kepada 16 kecamatan. Mengingat jangkauan wilayah pemadaman kebakaran se-Kota Semarang yang cukup luas, dan banyaknya bangunan Gedung tinggi serta pemukiman padat penduduk, ketersediaan 7 pos yang ada di Kota Semarang belum mampu menunjang kecepatan dan kesiapsiagaan penanganan bencana kebakaran. Selain itu dilihat dari titik pos masih banyak wilayah Kota Semarang yang jangkauannya masih terbatas. Berikut adalah gambaran jangkauan pos pemadam kebakaran dengan cakupan wilayah Kota Semarang.

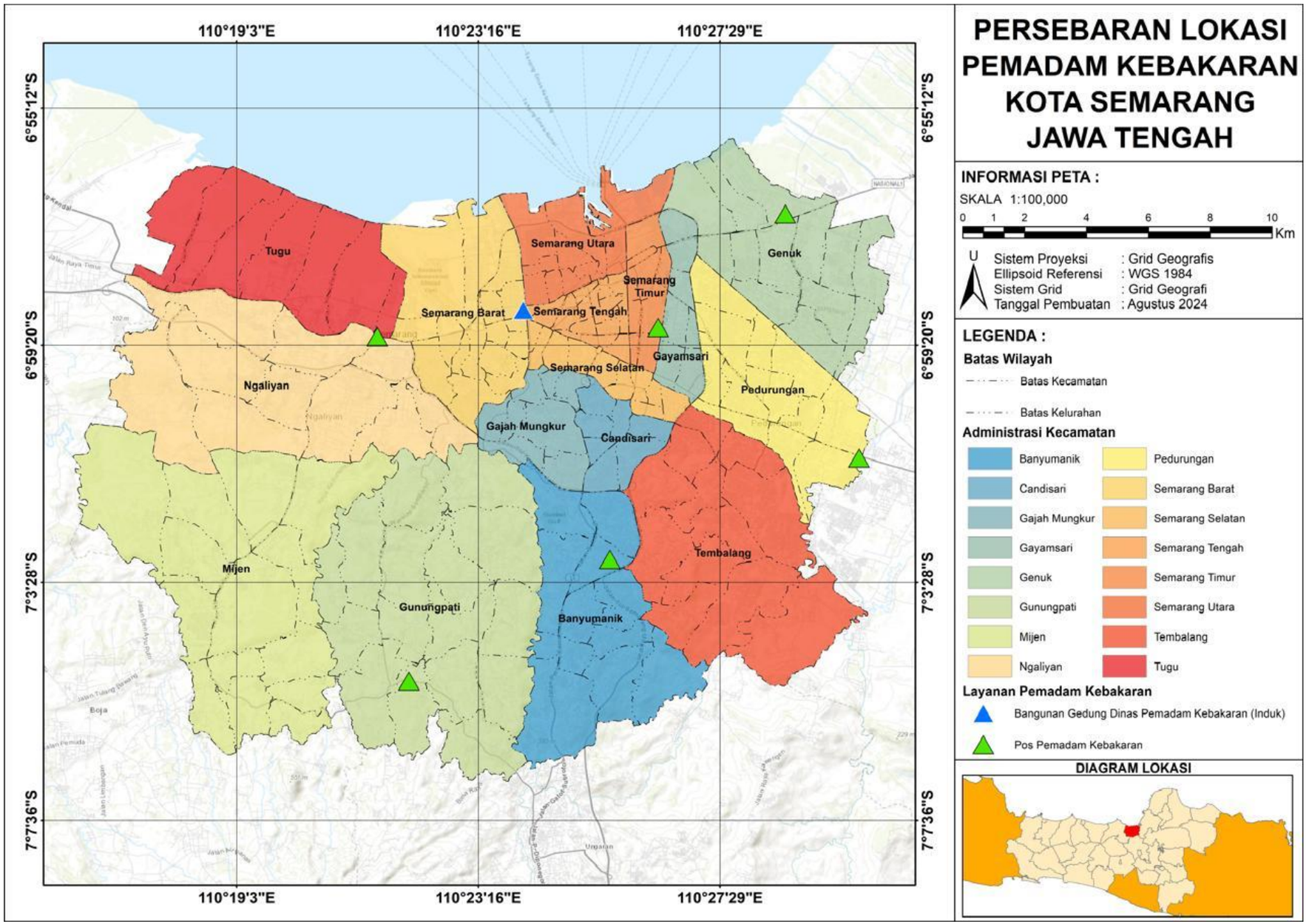
110°19'3"E
110°23'16"E
110°27'29"E
6°55'12"S
6°59'20"S
7°3'28"S
7°7'36"S
Tugu
Semarang Utara
Semarang Timur
Genuk
Semarang Barat
Semarang Tengah
Gayamsari
Semarang Selatan
Pedurungan
Ngaliyan
Gajah Mungkur
Candisari
Tembalang
Mijen
Gunungpati
Banyumanik
PERSEBARAN LOKASI PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
INFORMASI PETA :
SKALA 1:100,000
0 1 2 4 6 8 10
Km
U
Sistem Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi
Tanggal Pembuatan : Agustus 2024
LEGENDA :
Batas Wilayah
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan
Administrasi Kecamatan
Banyumanik
Candisari
Gajah Mungkur
Gayamsari
Genuk
Gunungpati
Mijen
Ngaliyan
Pedurungan
Semarang Barat
Semarang Selatan
Semarang Tengah
Semarang Timur
Semarang Utara
Tembalang
Tugu
Layanan Pemadam Kebakaran
Bangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran (Induk)
Pos Pemadam Kebakaran
DIAGRAM LOKASI

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Disamping itu, perlu dipahami bahwa SPM berbeda dengan Standar Teknis, karena Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk :

a. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu.
b. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.
c. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.
d. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.
e. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.

f. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dituntut untuk terus melakukan pelayanan terhadap Masyarakat di lingkup wilayah Kota Semarang sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan. Dinas Pemadam Kebakaran menegaskan bahwa responsifitas penanganan kebakaran merupakan aspek krusial yang perlu untuk terus ditingkatkan baik dari segi sarana dan prasarana maupun manejemen penanganannya. Bagian ini akan membahas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuannya.

a. Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

Dilihat dari indikator tujuan dan sasaran renstra di tahun 2024, ketiga indikator yang telah ditetapkan sudah mencapai target yang ditentukan, hal ini menunjukan konsistensi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dinas pada periode renstra sebelumnya. Selanjutnya dari indikator IKU terdapat 1 indikator yang sedikit belum mencapai target yakni indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM). Capaian indiator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) masih sebesar 99,74%.

Ditinjau dari indikator program terdapat 2 indikator program yang capaiannya masih sangat rendah yakni indikator layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan indikator bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran. Indikator layanan pemadam yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran capaiannya sangat rendah karena di tahun 2024 partisipasi aktif relawan pemadam kebakaran yang dibentuk Dinas dalam penanganan kebakaran/penyelamatan hanya sebesar 4,99%. Selanjutnya capaian indikator bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran juga masih rendah yaitu 47,78% karena banyaknya bangunan gedung di Kota Semarang yang belum memiliki alat proteksi kebakaran sesuai ketentuan.

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dalam setiap bidang tugasnya dibagi menjadi berbagai tingkat pencapaian, yang terperinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK / SPM / NSPK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra Damkar 2021-2026																	
1.	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	SPM	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) layanan pemadaman kebakaran di Kota Semarang	SPM	%	87,67	100	88	88,32	88,57	77,04	79,87	88	88,55	89,44	87,87	79,87%	100	100,26	100,98
3.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran)	SPM	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B	Indikator Kinerja Damkar																	
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	IKK	%	100	100	100	100	100	99,43	79,87	98,02	92,03	99,65	99,43	79,87	98,02	92,03	99,65
2.	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	IKK	menit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,8	10,75	10,3	10,71	11,55	100%	100%	100%	100%	100%
C	Indikator Program dalam Renstra Damkar																	
1.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Program RPJMD																
a	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indikator Program RPJMD	%	87,67	88	88,2	88,4	88,6	77,04	79,87	105,18	88,55	89,44	87,87%	90,76%	92,77%	100,17%	100,95%
b	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	Indikator Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	98,01	100	100	100	100%	98,01%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK / SPM / NSPK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
c	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	Indikator Program RPJMD	%	11,8	12	12,2	12,4	12,6	0	44,74	7,89	3,48	4,99	0	372.83 %	64,67%	28,06 %	39,6%
d	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	Indikator Program RPJMD	%	67,5	70	70.83	71.67	72.50	5.62	15	26,23	35,9	47,78	8,33 %	21,43%	37,03%	50,09 %	65,9%
e	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Indikator Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program RPJMD																
a	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Indikator Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
b	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	Indikator Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
c	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Indikator Program RPJMD	%	100	100	100	100	100	97,5	100	100	99,31	97,92	97,5 %	100%	100%	99,31 %	97,92%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

Dilihat dari capaian kinerja indikator baik tujuan/sasaran, indikator IKU dan indikator program, dalam penyusunan renstra kedepannya perlu diperhatikan indikator terkait dengan Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran

Bagian ini akan menjelaskan anggaran dan penggunaan dana yang direalisasikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dalam konteks ini, akan diuraikan tahun-tahun di mana rasio antara penggunaan dana yang direalisasikan dan anggaran dapat dianggap baik atau kurang baik, serta aspek-aspek di mana kinerja tersebut dinilai baik atau kurang baik. Selanjutnya, akan dibahas faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Hasil interpretasi ini bertujuan untuk menggambarkan potensi dan tantangan dalam pendanaan layanan yang disediakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Tabel 2. 10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Rp)					Realisasi Capaian pada Tahun (Rp)					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	N/A	13.825.752.418	12.832.078.651	14.914.741.248	18.841.259.625	N/A	13,383,833,888	12.159.873.220	14.628.034.618	17.183.700.039	N/A	96,80	94,76	98,08	91,20
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	12.219.825.732	11.448.359.187	12.007.500.905	16.715.223.439	N/A	11,935,981,895	10.890.425.942	11.800.984.987	15.169.115.009	N/A	97,68	95,13	98,28	90,75
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	N/A	1.015.929.895	776.146.479	739.637.200	1.326.288.304	N/A	907,245,343	730.423.585	728.259.493	1.239.858.402	N/A	89,30	94,11	98,46	93,48
3	Investigasi Kejadian Kebakaran	N/A	0	10.000.000	17.062.942	15.721.944	N/A	0	9.397.750	10.457.200	15.000.000	N/A	0	93,98	61,29	95,41
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	N/A	589.996.791	560.890.985	964.763.917	616.547.560	N/A	540,606,650	494.808.543	920.256.310	596.545.678	N/A	91,63	88,22	95,39	96,76

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Rp)					Realisasi Capaian pada Tahun (Rp)					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	N/A	0	36.682.000	1.185.776.284	167.478.378	N/A	0	34.817.400	1.168.076.628	163.180.950	N/A	0	94,92	98,51	97,43
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	N/A	13.194.473.310	13.936.984.018	14.311.702.443	18.235.759.760	N/A	12.563.643.230	13.064.817.443	13.387.020.064	16.905.684.517	N/A	95,22	93,74	93,54	92,71
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	5.957.778	7.191.605	22.910.540	72.664.700	N/A	4.616.844	7.099.000	21.531.000	68.442.818	N/A	77,49	98,71	93,98	94,19
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	10.814.172.264	10.612.059.177	11.127.087.805	13.196.671.610	N/A	10.479.985.953	10.185.222.702	10.397.611.947	12.404.459.252	N/A	96,91	95,98	93,44	94,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	N/A	550.000	1.462.180	1.375.660	3.886.540	N/A	150.000	1.364.700	1.359.000	2.883.500	N/A	27,27	93,33	98,79	74,19
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	N/A	447.418	1.469.500	1.400.850	2.345.790	N/A	327.418	1.206.300	1.381.000	1.776.000	N/A	73,18	82,09	98,58	75,71
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	113.543.500	320.804.781	491.993.431	570.031.898	N/A	102.996.500	36.084.500	431.633.810	429.295.000	N/A	90,71	11,25	87,73	75,31

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Rp)					Realisasi Capaian pada Tahun (Rp)					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	255.429.439	582.251.647	297.705.446	576.136.485	N/A	183,366,281	508.906.130	268.182.148	512.862.550	N/A	71,79	87,40	90,08	89,02
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	0	511.660.072	407.681.836	859.923.457	N/A	0	494.379.700	393.651.500	789.503.765	N/A	0	96,62	96,56	91,81
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	475.944.610	487.485.334	491.447.398	600.327.860	N/A	452,557,941	453.204.517	461.172.646	523.040.589	N/A	95,09	92,97	93,84	87,13
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	1.528.428.301	1.412.599.722	1.470.099.477	2.353.771.420	N/A	1,339,642,293	1.377.349.894	1.436.852.513	2.173.421.043	N/A	87,65	97,50	97,74	92,34

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah seluruh masyarakat Kota Semarang, baik perorangan maupun kelompok, masyarakat umum, pelaku bisnis, maupun lembaga pemerintah di Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Semarang.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan, antara lain:

1) Relawan pemadam kebakaran terkait dengan bantuan pemadaman awal kebakaran
2) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan terkait dengan peningkatan kapasitas SDM damkar
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dengan kolaborasi penanganan kebencanaan khususnya kebakaran
4) Dinas-dinas yang memiliki tangki air sebagai bantuan pemadaman kebakaran seperti: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
5) Dinas Penataan Ruang terkait dengan perizinan proteksi kebakaran bangunan gedung
6) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait kolaborasi pertolongan dan penyelamatan korban
7) Palang Merah Indonesia terkait pertolongan pertama korban
8) Dinas Perhubungan terkait dengan lalu lintas
9) Dinas Kesehatan/Puskesmas terkait dengan pertolongan dan penyelamatan korban
10) Perusahaan Listrik Negara terkait dengan pemadaman listrik di lokasi kebakaran
11) Pemangku wilayah terkait dengan pengkondisian wilayah yang mengalami kebakaran

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal merupakan BUMD yang ikut mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan air saat pemadaman kebakaran. PDAM memiliki hidran kota, tandon air dan mobil tangki air yang siap membantu saat dibutuhkan dalam pemadaman kebakaran.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menjalin kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani sub urusan kebakaran di daerah berbatasan seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal dengan dibuatnya perjanjian kerjasama untuk saling membantu saat membutuhkan bantuan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

2.1.8 Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Berkaitan Kota Layak Anak

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang memiliki komitmen dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target Kota Layak Anak dengan memberikan perlindungan

khusus kepada anak dalam situasi darurat melalui penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran yang tertuang dalam Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dalam bentuk kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

2.1.9 Keterkaitan Dinas Pemadam Kebakaran dengan Posyandu

Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan. Salah satu pelaksanaannya berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, meliputi dukungan:

a. Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Beberapa permasalahan dan isu strategis berkaitan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Permasalahan utama terkait pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah belum optimalnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan. Sedangkan untuk permasalahan dan akar permasalahan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan non kebakaran	- Belum optimalnya jangkauan layanan pemadaman kebakaran - Belum optimalnya layanan penyelamatan dikarenakan pelayanan sering diluar tupoksi - Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan instansi terkait (instansi internal dan ekstenal)
2	Belum optimalnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	- Belum optimalnya Kesiapan dan pengadaan prasarana - Belum optimalnya Kesiapan dan pengadaan sarana pemadaman dan penyelamatan - Belum optimalnya Pemenuhan standarisasi dan analisa Kebutuhan
3	Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan	- Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan - Belum optimalnya kapasitas SDM pemadam dan penyelamatan - Belum optimalnya fungsi koordinasi terkait Kerjasama dengan stakeholder

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		- Belum optimalnya peran relawan dalam membantu Damkar
4	Belum optimalnya pencegahan kebakaran	- Belum optimalnya penilaian proteksi kebakaran gedung - Belum optimalnya Penindakan terhadap pemasangan proteksi kebakaran gedung yang tidak sesuai ketentuan - Belum optimalnya pemeriksaan terhadap gambar rencana proteksi kebakaran
5	Belum optimalnya Kualitas Kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran	- Belum optimalnya Kualitas Dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran - Belum optimalnya pelaporan keuangan dan pencatatan Barang Milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran - Belum optimalnya Kualitas dan Pemenuhan Sarana prasarana kantor dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

2.2.2 Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Isu strategis merujuk pada tantangan dan peluang utama yang dapat mempengaruhi arah dan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Identifikasi isu strategis ini adalah langkah kritis dalam perencanaan karena memungkinkan organisasi untuk memfokuskan sumber daya dan energi pada area yang paling signifikan. Isu-isu ini biasanya berkaitan dengan faktor eksternal seperti perubahan pasar, regulasi baru, kemajuan teknologi, serta tren sosial dan ekonomi. Selain itu, faktor internal seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, dan kemampuan sumber daya manusia juga dapat menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan.

Pengelolaan isu strategis memerlukan analisis mendalam dan pendekatan yang terencana. Misalnya, dalam menghadapi perubahan teknologi, organisasi perlu mengevaluasi kemampuan teknologi mereka saat ini dan merancang strategi untuk mengadopsi teknologi baru yang relevan. Begitu pula, jika ada perubahan regulasi yang signifikan, organisasi harus siap menyesuaikan proses operasional dan kebijakan internalnya agar tetap sesuai dengan peraturan baru. Pendekatan proaktif dalam menangani isu strategis ini akan membantu organisasi tetap kompetitif dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan.

2.2.2.1 Telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai kondisi sosial masyarakat Jawa Tengah yang lebih baik ditunjukkan dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

"Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan"

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah yang akan diwujudkan sebagai berikut:

Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis

Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter

2.2.2.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang disebutkan Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum meliputi kawasan fasilitas kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan. Yang dimaksud dengan fasilitas keamanan dan keselamatan adalah fasilitas pemadam kebakaran dengan ketentuan umum kegiatannya diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi; diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan umum; dan pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen). Rencana KDB maksimal untuk kawasan peruntukan pelayanan umum adalah 60% dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi:

a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran
b. Jaringan listrik dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik

2.2.2.3 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Telaah terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang 2025-2029, kebakaran menjadi penyebab pencemaran udara yang berasal dari kegiatan manusia (*anthropogenic sources*). Sejak 2021 hingga 2023 kebakaran menjadi salah satu jenis bencana yang jumlahnya mengalami peningkatan di Kota Semarang. Tahun 2021 terjadi 149 kebakaran, 2022 terjadi 152 kebakaran, tahun 2023 terjadi 489 kebakaran, dan tahun 2024 sebanyak 341 kebakaran.

Salah satu kebakaran yang memerlukan waktu pemadaman hingga 1 bulan adalah kebakaran TPA Jatibarang pada 5 Oktober 2023. Perlu dilakukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya kembali kebakaran di TPA Jatibarang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Mencegah munculnya percikan api dengan mencegah atau melarang segala bentuk yang memicu api antara lain dengan inspekasi sampah yang masuk ke TPA, melarang pembakaran sampah di TPA, melarang merokok di area TPA
b. Melakukan penutupan lapisan atas dengan tanah untuk mencegah kebakaran pada bagian permukaan TPA
c. Memperketat keamanan TPA serta menerapkan Standar Operational Procedure (SOP) dalam pengoperasioan TPA

2.2.2.3 Telaah Visi Misi Wali Kota Semarang 2025-2029

Visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF".

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi "Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif", dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah. Dinas Pemadam Kebakaran mendukung misi 6 yaitu Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob,

Serta Dampaknya Bagi Masyarakat. Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana.

Penjabaran dari misi keenam ini adalah pokok visi Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat dengan sasaran yang harus diwujudkan yaitu Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan, dengan indikator Indeks risiko bencana. Strategi yang diambil yaitu Peningkatan kesiapsiagaan kota dan masyarakat dalam kebencanaan.

Nomenklatur yang digunakan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Outcome program Meningkatnya kualitas pencegahan kebakaran dan indikatornya Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran. Masuk dalam Program prioritas Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor.

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029, RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031, KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029, dan Visi Misi Wali Kota Semarang 2025-2029 diperoleh isu-isu strategis yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kota Semarang. Isu-isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rancangan Rencana Strategis DAMKAR Kota Semarang Tahun 2025-2029. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Standarisasi
   Isu ini berkaitan dengan penyusunan regulasi, penegakan regulasi, serta penyusunan SOP pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Isu ini juga mencakup upaya memperkuat standar nasional dan lokal mengenai pencegahan, pemeriksaan, pemeliharaan alat proteksi kebakaran dan penanganan kebakaran, serta memastikan semua regulasi tersebut dipatuhi oleh seluruh *stakeholders*, termasuk pemenuhan kualitas sarana dan prasana pemadaman kebakaran, mengingat pemadaman kebakaran dituntut untuk dapat dilaksanakan dengan cepat, maka pemenuhan sarana dan prasana menjadi aspek yang krusial
2. Optimalisasi Teknologi Modern
   Isu ini berkaitan dengan upaya pemanfaatan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan alat proteksi kebakaran dan penanganan kebakaran. Salah satu bentuk optimalisasi teknologi modern dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan IoT dalam pemeriksaan, penggunaan drone pemadam kebakaran sebagai alternatif pengganti mobil tangga pemadam kebakaran, dan lain sebagainya.
3. Penguatan Manajemen Resiko Kebakaran
   Isu ini berkaitan dengan upaya mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen risiko kebakaran yang komprehensif untuk identifikasi potensi bahaya dan mitigasi risiko secara proaktif.
4. Penyediaan SDM Pemadam kebakaran yang berkompeten
   Isu ini berkaitan dengan pemenuhan kualitas pemadam kebakaran sesuai dengan kompetensi. Pentingnya penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas di bidang pemadaman dan investigasi kebakaran, penyelamatan, proteksi kebakaran gedung, dan pemberdayaan

masyarakat. Hal ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan publik Dinas Pemadam Kebakaran.

5. Peran dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Relawan dalam Pemadaman Kebakaran
   Isu ini berkaitan dengan upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi relawan yang aktif dalam pemadaman kebakaran, kondisi partisipasi relawan dalam penanganan kebakaran di tahun 2024 masih sangat rendah (kurang 5%).
6. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Instansi
   Adanya urbanisasi yang berdampak pada peningkatan penduduk, dan peningkatan kemacetan di Kota Semarang, dan dengan melihat kondisi wilayah Kota Semarang yang mayoritas memiliki ciri perumahan padat penduduk, maka percepatan penanganan kebakaran harus dilakukan melalui kerjasama dengan instransi terkait.

Tabel 2.11 Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemadaman kebakaran dan penyelamatan	1. Belum optimalnya Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan non kebakaran 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan 3. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan 4. Belum optimalnya pencegahan kebakaran 5. Belum optimalnya Kualitas Kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran	Adanya kejadian bencana alam dan perubahan iklim	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	1. Penguatan Regulasi dan Standarisasi 2. Optimalisasi Tekonologi Modern 3. Penguatan Manajemen Resiko Kebakaran 4. Penyediaan SDM Pemadam kebakaran yang berkompeten 5. Peran dan Pertisipasi Masyarakat sebagai Relawan dalam Pemadaman Kebakaran 6. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Instansi

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Damkar dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Damkar Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Damkar Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal “Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan”.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Damkar Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah “pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota”. Adapun visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah “Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”, dimana hal ini dicapai melalui pembangunan Kota Semarang agar menjadi semakin hebat.

Dari pokok-pokok pikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan, agar dapat terwujud penanganan kebakaran dan penyelamatan yang berkualitas, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, yang dicapai melalui pembangunan Kota Semarang agar menjadi semakin hebat.

Dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu:

“Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Damkar Kota Semarang, yaitu “Persentase Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran”. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu: Tingkat waktu tanggap kebakaran dan Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (25%), Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan (25%), tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (25%), dan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran (25%).

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Damkar Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan

dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Damkar Kota Semarang, dimana Damkar mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa penanganan kebakaran dan penyelamatan memiliki keterkaitan dan memerlukan dukungan sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan relawan, serta proteksi kebakaran bangunan gedung dalam mendukung terwujudnya penanganan kebakaran dan penyelamatan yang berkualitas. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Damkar terkait peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Damkar maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya cakupan layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan

   Dengan indikator sasaran yaitu:

   a. Tingkat waktu tanggap kebakaran (*response time rate*) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran. Indikator ini diukur dari:
      1) Tingkat waktu tanggap kebakaran (*response time rate*) yaitu jumlah layanan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit dibandingkan dengan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani di Kota Semarang
      2) Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran yaitu membandingkan jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang terlaksana dengan jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang seharusnya diberikan.
   b. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

      Indikator ini diukur dari membandingkan jumlah target pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan jumlah realisasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan.
   c. Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

      Indikator ini diukur dari membandingkan jumlah layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap 15 menit oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dengan Jumlah kejadian kebakaran di Kota Semarang
   d. Persentase Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran

Indikator ini diukur dari membandingkan bangunan gedung yang diperiksa memenuhi persyaratan pemasangan peralatan proteksi kebakaran dengan jumlah pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran.

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran
   Dengan indikator sasaran yaitu:
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran.

      Indikator ini diukur dari hasil penilaian terhadap AKIP (Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah) Damkar Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja.
   b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemadam Kebakaran

      Indikator ini diukur dari hasil penilaian terhadap IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Damkar Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Persyaratan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/tarif; Produk, spesifikasi, dan Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; Sarana dan Prasarana.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan			Indeks Risiko Bencana	91,62 - 90,32	90,5 - 88,66	89,38 - 87	88,25 - 85,34	87,13 - 83,68	86,01 - 82,02	Program prioritas: Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan		Persentase Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran	N/A	61.96	62.18	62.44	62.69	62.94	Rumus perhitungan: (Tingkat waktu tanggap kebakaran dan persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia + Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan + tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran + bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran)/4
		Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran	(89,45 % + 100%) /2 = 94,725 %	(89,46 % + 100%) /2 = 94,73 %	(89,47 % + 100%) /2 = 94.73 5%	(89,48 % + 100%) /2 = 94.74 %	(89,49 % + 100%) /2 = 94.74 5%	(89,50 % + 100%) /2 = 94.75 %	Rumus perhitungan: (Jumlah layanan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit / jumlah kejadian kebakaran yang ditangani di Kota Semarang) x100% + {Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang terlaksana / Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang seharusnya diberikan} x 100% /2
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rumus perhitungan: (Jumlah target pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			pemadam kebakaran dan penyelamatan							penyelamatan/Jumlah realisasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dialksanakan) x 100%
			Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	5,1%	5,5%	6%	6,5%	7%	Rumus perhitungan: (Jumlah layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit oleh relawan pemadam kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran / Jumlah kejadian kebakaran di Kota Semarang) x 100%
			Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100%	48%	48,5%	49%	49,5%	50%	Rumus perhitungan: (Bangunan Gedung yang diperiksa memenuhi persyaratan pemasangan peralatan proteksi kebakaran / jumlah pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran gedung yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran) x 100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran	78.66	78.67	78.68	78.69	78.7	78.71	Definisi Operasional: Hasil evaluasi terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemadam Kebakaran	92	92.2	92.4	92.6	92.8	93	Definisi Operasional: Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Damkar Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif dan misi Pusat ekonomi yang lestari, berkelanjutan, dan inklusif.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Damkar Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan, dengan indikator Persentase Kesiapsiagaan Damkar:

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah:

1. Meningkatkan cakupan layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan indikator sasaran sebagai berikut:
    a. Tingkat waktu tanggap kebakaran (*response time rate*) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran
    b. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
    c. Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
    d. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran
2. Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dengan indikator sasaran sebagai berikut:
    a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran
    b. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran

3.3 Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Dokumen rencana strategis adalah kerangka kerja yang menetapkan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan wilayah yang spesifik. Teori yang mendasari rencana strategis mencakup konsep strategis dan kebijakan yang dirancang untuk mencapai visi jangka panjang dan tujuan-tujuan pembangunan daerah. Strategi menggambarkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan identifikasi prioritas utama, langkah-langkah taktis, serta alokasi sumber daya untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan

dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Pengoptimalan cakupan layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan
b. Pengoptimalan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
c. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
d. Peningkatan pencegahan kebakaran
e. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemadam Kebakaran
f. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran

3.4. Penahapan Renstra

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dilakukan secara bertahap. Seluruh strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menjadi prioritas setiap tahun, namun strategi yang diberi tanda tebal lebih prioritas dibandingkan prioritas yang lain. Penahapan layanan Dinas Pemadam Kebakaran tersebut tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
Tahun 2025-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengoptimalan cakupan layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan	Pengoptimalan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatan pencegahan kebakaran	1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemadam Kebakaran 2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

a. Pengoptimalan cakupan layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran adalah masih terdapat wilayah di Kota Semarang yang berada diluar jangkauan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Terdapat 7 pos eksisting yang tersebar di 7 Kecamatan, artinya masih ada 9 Kecamatan berada diluar WMK. Dinas Pemadam Kebakaran di tahun 2026 fokus dalam mengoptimalkan cakupan layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk pos pemadam kebakaran baru di Kecamatan Genuk (pos eksisting sering kebanjiran), Tembalang, dan Mijen. Tiap Pos dilengkapi dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 48 personil yang siaga bertugas bergantian selama 24 jam. Tiap unit mobil dilengkapi dengan sarana pemadaman kebakaran (slang, pemancar, dll) dan alat pelindung diri petugas (baju tahan panas, helm, masker, sepatu, kaos tangan, dll). Selain itu juga penambahan mobil penyelamatan, mengingat kenaikan jumlah layanan pemadaman dan penyelamatan setiap tahun yang meningkat 25%. Pengoptimalan cakupan layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dari 7 kecamatan menjadi 9 kecamatan membutuhkan penambahan pos pemadam kebakaran beserta unit mobil pemadam kebakaran, unit mobil penyelamatan, dan peralatan pendukungnya, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

b. Pengoptimalan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan

Ketersediaan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran terbatas. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan pengoptimalan di tahun 2027 sarana dan prasarana agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal kepada masyarakat. Langkah yang dilakukan antara lain:

1) Pengadaan sarana penyelamatan seperti mobil penyelamatan, mobil pemadam, mobil tangga, crane, hammer drill, jack hammer, concrete cutter, head immobilize, shorring holmatro, Holmatro shoring V-Strut, helm rescue, sarung tangan rescue, sava high pressure plat, scuba gear, jump suit rescue, Baju Anti Sengatan Lebah, dll.
2) Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti smoke chamber (gedung latihan pemadam), mobil pemadam kebakaran, foam liquid, pipa cabang, baju tahan panas, helm pemadam, nozzle, pistol grip, sarung tangan pemadam, mobil tangga, mobil crane, fire blanket mobil, sepatu boot kebakaran, lighting tower, dashcam, dll.
3) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
4) Pemeliharaan sarana dan prasarana penyelamatan

c. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Meskipun Redkar sudah terbentuk di seluruh kelurahan di Kota Semarang pada tahun 2025, namun partisipasinya dalam pemadaman kebakaran masih rendah, sehingga di tahun 2028 perlu adanya pembinaan terhadap REDKAR yang sudah terbentuk maupun penggantian REDKAR yang sudah tidak aktif. Partisipasi atau bantuan Redkar kepada Dinas Pemadam Kebakaran dapat berupa bantuan di lokasi kebakaran (pemadaman awal kebakaran, informasi sumber air, sterilisasi jalan dan

lokasi kebakaran dll.), laporan kejadian kebakaran, dan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat.

Selain pembentukan dan pembinaan Redkar, Dinas Pemadam Kebakaran juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui program *Damkar Goes To School*, menerima kunjungan edukasi dari anak sekolah, memberikan pelatihan dan sosialisasi ke masyarakat khususnya dunia usaha, *car free day*, dan dalam lingkup keluarga tanggap bencana kebakaran.

d. Peningkatan pencegahan kebakaran

Berdasarkan hasil pemeriksaan proteksi kebakaran yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran di periode renstra 2021-2026, bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran masih dibawah 50%. Ini berarti bahwa persentase bangunan gedung yang telah memasang proteksi kebakaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dapat berfungsi dengan baik masih rendah. Proteksi kebakaran gedung yang dipasang sesuai ketentuan dapat mencegah terjadinya kebakaran, meminimalisir kerugian akibat kebakaran yang terjadi dan yang paling penting adalah terselamatkannya nyawa penghuni gedung saat kebakaran terjadi. Oleh sebab itu, layanan peningkatan pencegahan kebakaran menjadi fokus Dinas Pemadam Kebakaran di tahun 2028 melalui pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran gedung, pemeriksaan kelayakan proteksi kebakaran gedung, dan pemeriksaan gambar rencana pemasangan proteksi kebakaran gedung agar bangunan gedung beserta panghuninya dapat terlindungi dari bahaya kebakaran.

e. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemadam Kebakaran dan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran

Di tahun 2030 ini fokus pada peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran. Belum semua layanan Dinas Pemadam Kebakaran dapat diajukan tanpa melalui tatap muka. Masih ada pengajuan layanan melalui surat menyurat atau datang ke Dinas Pemadam Kebakaran. Oleh sebab itu diperlukan digitalisasi layanan dan data, diberlakukan juga sistem pemantauan dan respon terpadu layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan digitalisasi data. Dengan demikian, masyarakat dengan mudah dapat mengajukan permohonan semua layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan memantau sejauhmana layanan tersebut sudah dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3.5 Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Damkar Kota Semarang. Dari hasil analisis tersebut dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah

kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah ditetapkan beberapa sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dalam Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029 dengan beberapa strategi yang dijabarkan dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bersih, Asri, Ramah, Tangguh, dan Nyaman	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bersih, Asri, Ramah, Tangguh, dan Nyaman	1. Meningkatkan jangkauan layanan pemadaman kebakaran 2. Meningkatkan layanan penyelamatan sesuai tupoksi 3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan instansi terkait (instansi internal dan ekstenal) 4. Meningkatkan Kesiapan dan pengadaan prasarana 5. Meningkatkan Kesiapan dan pengadaan sarana pemadaman dan penyelamatan 6. Pemenuhan standarisasi dan analisa Kebutuhan 7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan 8. Meningkatkan kapasitas SDM pemadam dan penyelamatan 9. Meningkatkan fungsi koordinasi terkait Kerjasama dengan stakeholder 10. Meningkatkan peran relawan dalam membantu Damkar 11. Meningkatkan layanan penilaian proteksi kebakaran gedung 12. Meningkatkan Penindakan terhadap pemasangan proteksi kebakaran gedung yang tidak sesuai ketentuan 13. Meningkatkan layanan pemeriksaan terhadap gambar rencana proteksi kebakaran 14. Meningkatkan Kualitas Dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran 15. Meningkatkan Kualitas Dokumen keuangan dan pencatatan Barang Milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran 16. Meningkatkan Kualitas dan Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Sasaran 1

Meningkatnya cakupan layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan

Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi 1.1 Pengoptimalan Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan penyelamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan jangkauan layanan pemadaman kebakaran;
b. Meningkatkan layanan penyelamatan sesuai tupoksi;
c. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan instansi terkait (instansi internal dan ekstenal).

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
b. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Strategi 1.2 Pengoptimalan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan Kesiapan dan pengadaan prasarana;
b. Meningkatkan Kesiapan dan pengadaan sarana pemadaman dan penyelamatan;
c. Pemenuhan standarisasi dan analisa Kebutuhan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
b. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Strategi 1.3 Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
b. Meningkatkan kapasitas SDM pemadam dan penyelamatan;
c. Meningkatkan fungsi koordinasi terkait Kerjasama dengan stakeholder;
d. Meningkatkan peran relawan dalam membantu Damkar.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
c. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Strategi 1.4 Peningkatan pencegahan kebakaran

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan layanan penilaian proteksi kebakaran Gedung;
b. Meningkatkan Penindakan terhadap pemasangan proteksi kebakaran gedung yang tidak sesuai ketentuan;
c. Meningkatkan layanan pemeriksaan terhadap gambar rencana proteksi kebakaran.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.

Sasaran 2

Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi 2.1 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemadam Kebakaran

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran;
b. Peningkatan Kualitas Dokumen keuangan dan pencatatan Barang Milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

Strategi 2.1 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

a. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan:

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang tertuang dalam renstra 2025–2029 ini sudah tertuju sebagai pendukung sasaran dan tujuan yang akan tercapai. Dalam penentuan program, kegiatan dan subkegiatan yang didalamnya sebagai pendukung tujuan OPD dengan meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) dengan tercapainya tujuan OPD untuk meningkatkan kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan diharapkan dapat mengurangi indeks risiko bencana (IRB) sebagai salah satu indikator sasaran daerah.

Tabel 4.1 Program Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkat-nya ketahanan kota dalam risiko kebencan-aan					Indeks Risiko Bencana		Program prioritas: Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
	Meningkat-nya kualitas penangan-an kebakaran dan penyelamatan				Persentase Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran		Penanggungjawab: Kepala Dinas DO/Rumus: (Tingkat waktu tanggap kebakaran dan persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia + Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan + tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran + bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran)/4
		Meningkat-nya cakupan layanan penangan-an kebakaran dan penyelamata n			1. Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran		Penanggungjawab: Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan DO/Rumus: (Jumlah layanan pemadamn kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit / jumlah kejadian kebakaran yang ditangani di Kota Semarang) x 100% + (Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang terlaksana / jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang seharusnya diberikan) x 100% /2
					2. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan		Penanggungjawab: Kepala Bidang Prasarana dan Sarana DO/Rumus: (Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran + dokumen pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyelamatan yang berkualitas / jumlah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
							dokumen pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran + dokumen pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyelamatan yang direncanakan) x 100%
					3. Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		Penanggungjawab: Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat DO/Rumus: (Jumlah layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit oleh relawan pemadam kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran / jumlah kejadian kebakaran di Kota Semarang) x 100%
					4. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran		Penanggungjawab: Kepala Bidang Pencegahan DO/Rumus: (Bangunan Gedung yang diperiksa memenuhi persyaratan pemasangan peralatan proteksi kebakaran / jumlah pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran) x 100%
			Meningkatnya Kualitas Pencegahan Kebakaran		1. Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanggungjawab: Kepala Bidang Pencegahan DO/Rumus: (Jumlah dokumen penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan inspeksi peralatan proteksi kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan inspeksi peralatan proteksi kebakaran yang direncanakan) x 100%
			Meningkatnya Kesiapan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		2. Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan		Penanggungjawab: Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan DO/Rumus: (Jumlah dokumen pemadaman, pengendalian, penyelamatan, penanganan B3, investigasi, dan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang berkualitas / Jumlah dokumen dokumen dokumen pemadaman, pengendalian, penyelamatan, penanganan B3, investigasi, dan Operasi Pencarian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
							dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang direncanakan) x 100%
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		3. Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaaan aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama		Penanggungjawab: Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat DO/Rumus: (Jumlah dokumen peningkatan kompetensi aparatur pemadam kebakaran, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi aparatur penyelamatan atau Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang berkualitas / Jumlah dokumen peningkatan kompetensi aparatur pemadam kebakaran, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi aparatur penyelamatan atau Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang direncanakan) x 100%
			Meningkatnya Kesiapan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4. Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan		Penanggungjawab: Kepala Bidang Prasarana dan Sarana DO/Rumus: (Jumlah dokumen pengadaan, pemeliharan, dan standarisasi sarpras pemadaman kebakaran, dokumen Pengadaan, pemeliharan, dan Standarisasi penyelamatan yang berkualitas / Jumlah dokumen pengadaan dan standarisasi sarpras pemadaman kebakaran, dokumen Pengadaan dan Standarisasi penyelamatan yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen pencegahan kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen pencegahan kebakaran yang direncanakan) x100%
				Terselenggaranya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang direncanakan) x100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan APD yang berkualitas / Jumlah dokumen standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan APD yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran yang direncanakan) x 100%
				Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan SetiapTahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang berkualitas / Jumlah dokumen Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKPs) yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Persentase penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang berkualitas / Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan	Persentase penyelenggaraan Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		dan Penyelamatan (RISPKP) yang berkualitas / Jumlah dokumen Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase penyelenggaraan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang berkualitas / Jumlah dokumen Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang berkualitas / Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (Jumlah dokumen Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang direncanakan) x 100%
				Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Sub kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (SetiapTahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (SetiapTahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan SetiapTahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (SetiapTahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Sub kegiatan Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Sub kegiatan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (jumlah dokumen pendataan sarpras proteksi kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen pendataan sarpras proteksi kebakaran yang direncanakan) x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (jumlah dokumen Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala sarpras proteksi kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala sarpras proteksi kebakaran yang direncanakan) x 100%
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Sub kegiatan Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (Jumlah dokumen investigasi yang berkualitas / Jumlah dokumen investigasi yang direncanakan) x 100%
				Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Sub kegiatan Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terselenggaranya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (jumlah dokumen Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran yang berkualitas / jumlah dokumen Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran yang direncanakan) x100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase Penyelenggaraan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana yang berkualitas / Jumlah dokumen Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya yang berkualitas / Jumlah dokumen Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/rumus: (Jumlah dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran yang direncanakan) x 100%
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan	Sub kegiatan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Penanggulangan Kebakaran	
				Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	Sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (Jumlah dokumen Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang berkualitas / Jumlah dokumen Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (Jumlah dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang berkualitas / Jumlah dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi yang berkualitas / Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		dan Evakuasi yang berkualitas / Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (Jumlah dokumen Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang berkualitas / Jumlah dokumen Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang direncanakan) x 100%
				Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar		Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO/Rumus: (Jumlah dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar yang berkualitas / Jumlah dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar yang direncanakan) x 100%
				Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Sub kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah,dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Manusia/Penyelamatandan Evakuasi yang Sah dan Legal	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Sub kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
		Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran		Penanggungjawab: Sekretaris DO: Hasil evaluasi terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran		Penanggungjawab: Sekretaris DO: Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas		1. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penanggungjawab: Sekretaris DO: (Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan OPD yang berkualitas / Jumlah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			dalam mendukung kinerja pemadam kebakaran dan penyelamatan		Persentase kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran		dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan OPD yang direncanakan) x 100%
					2. Persentase kualitas kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran		Penanggungjawab: Sekretaris DO: (Nilai layanan kepegawaian OPD + persentase sarana dan prasarana OPD yang terpenuhi + persentase aduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti) / 3
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO: (Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD yang berkualitas / Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD yang direncanakan) x 100%
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Sub kegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan		(Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan OPD yang berkualitas / Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan OPD yang direncanakan) x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausaha-an dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Prognosis Realisasi Anggaran		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO: (Jumlah dokumen administrasi barang milik OPD yang berkualitas / Jumlah dokumen administrasi barang milik OPD yang direncanakan) x 100%
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terwujudnya tertib administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD sesuai peraturan perundangan dalam rangka pencapaian target pendapatan	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO: (Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah berdasarkan kewenangan OPD yang berkualitas / Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah berdasarkan kewenangan OPD yang direncanakan) x 100%
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Sub kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO: (Nilai kepuasan pegawai OPD terhadap layanan kepegawaian OPD + persentase SDM OPD yang meningkat kompetensinya) / 2
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO: (Jumlah item administrasi umum dan sarpras kantor OPD yang terpenuhi / Jumlah item

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran			administrasi umum dan sarpras kantor OPD yang direncanakan) X 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Pemerintahan Berbasis Elektronik	
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO: (Jumlah item BMD penunjang kegiatan OPD yang terpenuhi / Jumlah item BMD penunjang kegiatan OPD yang direncanakan) X 100%
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang selesai ditindaklanjuti	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO: (Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang + Persentase aduan masyarakat kepada OPD yang selesai ditindaklanjuti) / 2
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF DO: (Jumlah item BMD penunjang kegiatan OPD yang terpelihara / Jumlah item BMD penunjang kegiatan OPD yang direncanakan) X 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penanggungjawab: Eselon 4/Subkoor/Kasi/JF

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan subkegiatan Serta Pendanaan

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tahun 2025-2029 diwujudkan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Berikut diuraikan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif yang tertuang dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG							39.349.828.533		43.740.956.539		45.652.179.840		46.003.244.403		46.831.333.003	
1.05.01 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							7.330.929.660		8.693.405.435		9.036.515.684		7.851.058.099		7.505.093.626	
1. Meningkatnya Kualitas Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	%	100			100	788,869,728	100	855,000,000	100	820,000,000	100	835,000,000	100	717,287,613	
2. Meningkatnya Kesiapan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	%	100			100	1,192,100,000	100	1,405,337,813	100	1,486,000,000	100	1,518,000,000	100	1,260,890,997	
3. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaaan aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama	%	100			100	1,450,000,000	100	1,715,000,000	s100	2,000,000,000	100	1,605,671,897	100	1,800,000,000	
4. Meningkatnya Kesiapan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	100			100	3,899,959,932	100	4,718,067,622	100	4,730,515,684	100	3,892,386,202	100	3,726,915,016	
1.05.04.2.01 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		%					3.017.013.574		3.654.194.840		3.776.407.221		3.264.166.892		3.021.464.772	
1. Terselenggaranya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	140.000.000	100	100	288.869.728	100	310.000.000	100	340.000.000	100	345.000.000	100	250.000.000	
2. Terselenggaranya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	8.491.403.045	100	100	958.100.000	100	1.151.337.813	100	1.200.000.000	100	1.210.000.000	100	930.890.997	
3. Terselenggaranya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	100	100	5.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4. Terselenggaranya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	%	100	18.671.610	100	1001	81.353.052	100	89.488.357	100	98.437.193	100	108.280.912	100	114.109.003	
5. Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	%	0	0	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	180.000.000	0	0	0	0	
6. Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	%	100	79.939.635	100	100	50.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	
7. Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Persentase penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	%	0	0	100	0	0	100	115.000.000	0	0	0	0	0	0	
8. Terselenggaranya Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase penyelenggaraan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	%	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	66.000.000	
9. Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	%	398	7.951.361.162	100	100	1.317.690.794	100	1.952.368.670	100	2.080.970.028	100	1.712.885.980	100	1.661.464.772	
10. Terselenggaranya Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	27.742.987	100	100	100.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	
11. Terselenggaranya Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Persentase penyelenggaraan Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	%	0	0	100	100	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.05.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							288.869.728		310.000.000		340.000.000		345.000.000		250.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	6	140.000.000	12	300	288.869.728	350	310.000.000	400	340.000.000	450	345.000.000	250	250.000.000	
	Jumlah dokumen pemeriksaan gambar rencana pemasangan peralatan proteksi kebakaran gedung	Dokumen			12	300		350		400		450		250		
1.05.04.2.01.0002 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.491.403.045			936.100.000		1.151.337.813		1.200.000.000		1.210.000.000		930.890.997	
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	300	8.491.403.045	300	300	936.100.000	300	1.151.337.813	300	1.200.000.000	300	1.210.000.000	300	930.890.997	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan			300	300		300		300		300		300		
1.05.04.2.01.0004 Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	7	5	5.000.000	5	6.000.000	5	7.000.000	5	8.000.000	5	9.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			7	5		5		5		5		5		
1.05.04.2.01.0005 Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							81.353.052		89.488.357		98.437.193		108.280.912		114.109.003	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	18.671.610	1	1	81.353.052	1	89.488.357	1	98.437.193	1	108.280.912	1	114.109.003	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen				1		1		1		1		1		
1.05.04.2.01.0007 Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran							150.000.000		150.000.000		180.000.000		0		0	
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	0	0	0	10	150.000.000	10	150.000.000	10	180.000.000	0	0	0	0	
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang			0	10		10		10		0		0		
1.05.04.2.01.0008 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)							50.000.000		70.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000	
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	7	79.939.635	7	7	50.000.000	7	70.000.000	7	80.000.000	7	85.000.000	7	90.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan				7		7		7		7		7		
1.05.04.2.01.0011 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)							0		115.000.000		0		0		0	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0	0	0	1	115.000.000	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen				0		1		0		0		0		
1.05.04.2.01.0015 Sub Kegiatan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan							0		0		0		0		66.000.000	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	66.000.000	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen			0	0		0		0		0		1		
1.05.04.2.01.0017 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							1.317.690.794		1.952.368.670		2.080.970.028		1.712.885.980		1.661.464.772	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	398	7.951.361.162	21	25	1.317.690.794	30	1.952.368.670	35	2.080.970.028	20	1.712.885.980	22	1.661.464.772	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output			Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun										Ket
							2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				21	25		30		35		20		22		
		1.05.04.2.01.018 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							100.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	5	27.742.987	5	5	100.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	5	140.000.000	5	150.000.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen			5	5		5		5		5		5		
		1.05.04.2.01.0020 Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)							66.000.000		0		0		0		0	
		Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0	1	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen			0	1		0		0		0		0		
		1.05.04.2.02 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							434.000.000		430.000.000		480.000.000		490.000.000		401.287.613	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Output: 1. Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	%	100	10.000.000		100	40.000.000	100	60.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	
2. Terlaksananya Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Persentase Pelaksanaan Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	%	0	0		100	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Terlaksananya Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	%	100	1.316.288.304	100	100	350.000.000	100	370.000.000	100	400.000.000	100	405.000.000	100	311.287.613	
1.05.04.2.02.0001 Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran							40.000.000		60.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung an yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	12	10.000.000	12	150	40.000.000	180	60.000.000	210	80.000.000	230	85.000.000	260	90.000.000	
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen			12	150		180		210		230		260		
1.05.04.2.02.0004 Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan							44.000.000		0		0		0		0	
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	0	0	0	2	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang			0	2		0		0		0		0		
1.05.04.2.02.0005 Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran							306.000.000		370.000.000		400.000.000		405.000.000		311.287.613	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	12	1.316.288.304	12	1300	306.000.000	1400	370.000.000	1500	400.000.000	1600	405.000.000	1100	311.287.613	
	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan			12	1300		1400		1500		1600		1100		
1.05.04.2.03 Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran							29.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	
Terselenggaranya Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	Persentase Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	%	0	0	0	100	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Persentase Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	%	100	15.721.944	100	100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	
1.05.04.2.03.0003 Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran							22.000.000		0		0		0		0	
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Orang	0	0	0	1	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Orang			0	1	22.000.000	0		0		0		0		
1.05.04.2.03.0004 Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran							7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	
Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	0	0	0	50	7.000.000	50	8.000.000	50	9.000.000	50	10.000.000	50	11.000.000	
	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan			0	50		50		50		50		50		
1.05.04.2.04 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							1.050.000.000		1.275.000.000		1.500.000.000		1.265.671.897		1.430.000.000	
Terselenggaranya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	%	0	0	0	100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	
Terselenggaranya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase penyelenggaraan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	%	100	317.134.452	100	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	440.671.897	100	500.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terselenggaranya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	%	100	34.573.718	100	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	
Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	%	100	264.839.390	100	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	
1.05.04.2.04.0004 Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran							50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		130.000.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	0	0	0	10	50.000.000	15	75.000.000	20	100.000.000	25	125.000.000	30	130.000.000	
	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang			0	10		15		20		25		30		
1.05.04.2.04.0005 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana							400.000.000		450.000.000		500.000.000		440.671.897		500.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Unit	1320	317.134.452	1488	1350	400.000.000	1375	450.000.000	1400	500.000.000	1370	440.671.897	1390	500.000.000	
	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Unit			1488	1500		1550		1600		1500		1600		
1.05.04.2.04.0006 Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran							300.000.000		350.000.000		400.000.000		300.000.000		350.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Orang	1000	34.573.718	1920	2.400	300.000.000	2.600	350.000.000	2.800	400.000.000	3.000	300.000.000	3.200	350.000.000	
	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Orang				2.400		2.600		2.800		3.000		3.200		

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.04.2.04.0007 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran							300.000.000		400.000.000		500.000.000		400.000.000		450.000.000	
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	42	264.839.390	36	40	300.000.000	50	400.000.000	70	500.000.000	50	400.000.000	55	450.000.000	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan			36	40		50		70		50		55		
1.05.04.2.05 Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							2.800.916.086		3.016.210.595		2.931.108.463		2.476.219.310		2.391.341.241	
Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	%	100	66.500.000	100	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	
Terselenggaranya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	1.473.920	100	100	916.086	100	1.007.694	100	1.108.463	100	1.219.310	100	1.341.241	
Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	%	0	0	100	100	150.000.000	100	170.000.000	100	190.000.000	100	200.000.000	100	220.000.000	
Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	99.504.458	100	100	1.000.000.000	100	1.175.202.901	100	1.050.000.000	100	570.000.000	100	450.000.000	
Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	99.504.458	100	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	%	0	0	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output			Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
							2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.04.2.05.0001 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia							80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	500	66.500.000	0	1.389	80.000.000	1.389	90.000.000	1.389	100.000.000	1.389	110.000.000	1.389	120.000.000	
			Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan Operasi penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan			0	1.389		1.389		1.389		1.389		1.389		
		1.05.04.2.05.0002 Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi							916.086		1.007.694		1.108.463		1.219.310		1.341.241	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	1	1.473.920	1	1	916.086	1	1.007.694	1	1.108.463	1	1.219.310	1	1.341.241	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
		1.05.04.2.05.0004 Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi							150.000.000		170.000.000		190.000.000		200.000.000		220.000.000	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	0	0	5	1	150.000.000	1	170.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan			5	1		1		1		1		1		
1.05.04.2.05.0005 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi							1.000.000.000		1.175.202.901		1.050.000.000		570.000.000		450.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	11	99.504.458	0	13	1.000.000.000	13	1.175.202.901	13	1.050.000.000	13	570.000.000	13	450.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				0	13		13		13		13		13		
1.05.04.2.05.0006 Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran							70.000.000		80.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000	
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	20	6.105.000	390	20	70.000.000	20	80.000.000	20	90.000.000	20	95.000.000	20	100.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan			390	20		20		20		20		20		
1.05.04.2.05.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar							1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran,serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	0	0	0	25	1.500.000.000	25	1.500.000.000	25	1.500.000.000	25	1.500.000.000	25	1.500.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit				25		25		25		25		25		
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							32.018.898.873		35.047.551.104		36.615.664.156		38.152.186.304		39.326.239.337	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang berkualitas	%	100	13.271.682.100	100	100	27.148.797.425	100	28.510.518.653	100	29.941.652.765	100	31.638.605.647	100	33.010.134.006	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	%	100	3.783.726.775	100	100	5.605.109.873	100	7.688.721.040	100	7.768.031.251	100	7.614.617.060	100	7.359.958.823	
1.05.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				72.664.700			43.500.000		49.000.000		56.000.000		257.500.000		69.000.000	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	%	100	72.664.700	100	100	43.500.000	100	49.000.000	100	56.000.000	100	257.500.000	100	69.000.000	
1.05.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	30.690.800	5	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	3	3.500.000	2	3.500.000	
	Jumlah Dokumen Renja	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan Renja	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Renstra	Dokumen			1							1				
	Jumlah Dokumen Pengarusutamaan Gender	Dokumen			1											
	Jumlah Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Dokumen			1											
1.05.01.2.01.0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							6.000.000		6.000.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.228.700		1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.01.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.813.700	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.813.700	1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD							4.500.000		4.500.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.946.900	1	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							3.500.000		3.500.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.396.900	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	1.197.200	2	4	1.500.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	
	Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	Laporan			1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Monev Pembangunan	Laporan				1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Monev Perencanaan	Laporan			1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Laporan SAKIP	Laporan				1		1		1		1		1		
1.05.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	25.390.500	6	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.500.000	6	3.500.000	
	Jumlah Laporan LPPD	Laporan	1		1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan LKJIP	Laporan	1		1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan LKPJ	Laporan	1		1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Kota Layak Anak	Laporan	1		1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Inovasi daerah	Laporan	1		1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Laporan	1		1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.01.0008 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							0		0		0		50.000.000		0	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	
	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral	Dokumen			1	0		0		0		1		0		
1.05.01.2.01.0009 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data			0		2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data				1		1		1		1		1		
1.05.01.2.01.0010 Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							0		0		0		100.000.000		0	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	
	Jumlah BA Hasil Forum Perangkat Daerah Sub Urusan Kebakaran dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara			0	0		0		0		1		0		
1.05.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD							5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000		6.000.000	
Tersedianya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	0	0	0	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.500.000	10	5.500.000	10	6.000.000	
	Jumlah Dokumen Sistem informasi rencana umum pengadaan	Dokumen				1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen perjanjian kinerja	Dokumen				1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen perjanjian kinerja perubahan	Dokumen				1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen rencana aksi	Dokumen				1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen perubahan rencana aksi	Dokumen				1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen usulan standar harga satuan	Dokumen				1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah	Dokumen				1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen smart city	Dokumen				1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen pengarusutamaan gender	Dokumen				1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen musrenbang	Dokumen				1		1		1		1		1		
1.05.01.2.01.0012 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu							10.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000	
Tersedianya Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi	0	0	0	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sub Urusan kebakaran	Substansi			0	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.196.671.610			27.093.580.034		28.448.629.524		29.871.474.723		31.365.509.800		32.924.299.075	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	%	100	13.196.671.610		100	27.093.580.034	100	28.448.629.524	100	29.871.474.723	100	31.365.509.800	100	32.924.299.075	
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							26.784.319.463		28.123.466.716		29.529.570.645		31.005.979.076		32.556.207.227	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	111	12.895.562.000	288	341	26.784.319.463	341	28.123.466.716	341	29.529.570.645	341	31.005.979.076	341	32.556.207.227	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			288	341		341		341		341		341		
1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							300.476.400		315.500.220		331.275.231		347.838.993		355.230.943	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	291.849.000	12	12	300.476.400	12	315.500.220	12	331.275.231	12	347.838.993	12	355.230.943	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			12	12		12		12		12		12		
1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							1.044.648		1.149.113		1.264.024		1.390.426		1.529.469	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	949.680	12	12	1.044.648	12	1.149.113	12	1.264.024	12	1.390.426	12	1.529.469	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			12	12		12		12		12		12		
1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							1.944.459		2.138.905		2.352.796		2.588.076		2.846.884	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	2.067.690	12	12	1.944.459	12	2.138.905	12	2.352.796	12	2.588.076	12	2.846.884	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen			12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							782.540		860.794		946.873		1.041.560		1.145.716	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.236.400	1	1	782.540	1	860.794	1	946.873	1	1.041.560	1	1.145.716	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							1.605.824		1.766.406		1.943.047		2.137.352		2.351.087	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	12	1.459.840	12	12	1.605.824	12	1.766.406	12	1.943.047	12	2.137.352	12	2.351.087	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			12	12		12		12		12		12		
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							2.954.160		3.249.576		3.574.534		3.931.987		4.325.186	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.685.600	12	12	2.954.160	12	3.249.576	12	3.574.534	12	3.931.987	12	4.325.186	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			12	12		12		12		12		12		
1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							452.540		497.794		547.573		602.330		662.563	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	861.400	1	1	452.540	1	497.794	1	547.573	1	602.330	1	662.563	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.886.540			4.599.022		5.058.924		5.564.817		6.121.299		6.733.429	
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	%	100	3.886.540		100	4.599.022	100	5.058.924	100	5.564.817	100	6.121.299	100	6.733.429	
1.05.01.2.03.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							761.720		837.892		921.681		1.013.849		1.115.234	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	761.720	1	1	761.720	1	837.892	1	921.681	1	1.013.849	1	1.115.234	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.03.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							1.500.000		1.650.000		1.815.000		1.996.500		2.196.150	
Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	1	1	1.500.000	1	1.650.000	1	1.815.000	1	1.996.500	1	2.196.150	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.03.0005 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							1.148.752		1.263.627		1.389.990		1.528.989		1.681.888	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	1.044.320	12	12	1.148.752	12	1.263.627	12	1.389.990	12	1.528.989	12	1.681.888	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			12	12		12		12		12		12		
1.05.01.2.03.0006 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							1.188.550		1.307.405		1.438.146		1.581.961		1.740.157	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	2.080.500	12	12	1.188.550	12	1.307.405	12	1.438.146	12	1.581.961	12	1.740.157	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.01.2.04 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.345.790			7.118.369		7.830.205		8.613.225		9.474.548		10.101.502	
Terwujudnya tertib administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD sesuai peraturan perundangan dalam rangka pencapaian target pendapatan	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	%	100	2.345.790		100	7.118.369	100	7.830.205	100	8.613.225	100	9.474.548	100	10.101.502	
1.05.01.2.04.0001 Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah							485.892		534.481		587.929		646.722		711.394	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	441.720	1	1	485.892	1	534.481	1	587.929	1	646.722	1	711.394	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi pemakaian kendaraan bermotor	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.04.0001 Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah							485.892		534.481		587.929		646.722		711.394	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	441.720	1	1	485.892	1	534.481	1	587.929	1	646.722	1	711.394	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi pemakaian kendaraan bermotor	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.04.0001 Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah							485.892		534.481		587.929		646.722		711.394	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	441.720	1	1	485.892	1	534.481	1	587.929	1	646.722	1	711.394	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi pemakaian kendaraan bermotor	Dokumen			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.04.0003 Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah							5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.000.000	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi pemakaian kendaraan bermotor	Laporan			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.04.0006 Sub kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah							619.784		681.762		749.938		824.932		907.425	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	12	563.440	12	12	619.784	12	681.762	12	749.938	12	824.932	12	907.425	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen			12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.01.2.04.0007 Sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							1.012.693		1.113.962		1.225.358		1.347.894		1.482.683	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	1.340.630	12	12	1.012.693	12	1.113.962	12	1.225.358	12	1.347.894	12	1.482.683	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			12	12		12		12		12		12		
1.05.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				570.031.898			468.066.484		534.699.795		607.162.271		609.182.556		665.413.012	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	%	100	570.031.898		100	468.066.484	100	534.699.795	100	607.162.271	100	609.182.556	100	665.413.012	
1.05.01.2.05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							362.438.586		407.743.410		458.711.337		459.050.255		473.389.173	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	422.988.100	3	3	362.438.586	3	407.743.410	3	458.711.337	3	459.050.255	3	473.389.173	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			3	3		3		3		3		3		
1.05.01.2.05.0003 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			0	1	20.000.000	1		1		1		1		
1.05.01.2.05.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			0	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.05.0005 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							10.627.898		11.956.385		13.450.934		15.132.301		17.023.839	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	147.043.798	0	1	10.627.898	1	11.956.385	1	13.450.934	1	15.132.301	1	17.023.839	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			0	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.05.0010 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	50	30.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	50.000.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			0	50		50		50		50		50		
1.05.01.2.05.0011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							25.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	30	25.000.000	30	30.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	45.000.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			0	30		30		30		30		30		
1.05.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				576.136.485			754.733.917		1.173.879.767		1.118.984.935		1.079.622.112		1.070.449.874	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemadam Kebakaran	%	100	576.136.485		100	754.733.917	100	1.173.879.767	100	1.118.984.935	100	1.079.622.112	100	1.070.449.874	
1.05.01.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							19.725.492		22.191.178		24.965.075		28.085.709		31.596.422	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.616.075	1	1	19.725.492	1	22.191.178	1	24.965.075	1	28.085.709	1	31.596.422	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							239.473.525		646.524.328		523.835.068		425.266.013		394.674.264	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	315.147.617	1	7	239.473.525	7	646.524.328	7	523.835.068	7	425.266.013	7	394.674.264	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	7		7		7		7		7		

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.01.2.06.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5.500.000		7.000.000		8.500.000		10.000.000		11.500.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1.525.920	0	1	5.500.000	1	7.000.000	1	8.500.000	1	10.000.000	1	11.500.000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor							72.705.489		81.793.675		92.017.884		103.520.119		116.460.134	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	96.102.509	7	8	72.705.489	4	81.793.675	4	92.017.884	4	103.520.119	4	116.460.134	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			7	8		4		4		4		4		
1.05.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							21.467.866		24.1513.49		27.170.267		30.566.550		34.387.369	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	13.316.304	2	1	21.467.866	1	24.1513.49	1	27.170.267	1	30.566.550	1	34.387.369	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.06.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	3	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			0	3		3		3		3		3		
1.05.01.2.06.0007 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material							20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			0	2		2		2		2		2		
1.05.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu							33.699.375		37.911.796		42.650.770		47.982.116		53.979.880	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	14.430.000	32	78	33.699.375	80	37.911.796	82	42.650.770	84	47.982.116	86	53.979.880	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			32	78		80		82		84		86		
1.05.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							217.162.170		244.307.441		274.845.871		269.201.605		247.851.805	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	113.242.000	12	15	217.162.170	17	244.307.441	19	274.845.871	21	269.201.605	23	247.851.805	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	15		17		19		21		23		
1.05.01.2.06.0010 Sub Kegiatan enatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			0	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.06.0011 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							100.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1.756.060	0	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			0	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				859.923.457			636.965.420		1.702.934.199		1.233.044.864		1.271.994.565		675.210.056	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	%	100	859.923.457		100	636.965.420	100	1.702.934.199	100	1.233.044.864	100	1.271.994.565	100	675.210.056	
1.05.01.2.07.0001 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							230.650.000		0		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	1	1	230.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			1	1		0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel							55.713.144		231.427.287		210.355.697		197.900.159		154.512.679	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	12.791.918	1	5	55.713.144	10	231.427.287	10	210.355.697	10	197.900.159	10	154.512.679	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			1	5		10		10		10		10		
1.05.01.2.07.0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							67.461.303		74.207.433		81.628.176		84.790.994		98.770.093	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	8.865.792	195	10	67.461.303	10	74.207.433	10	81.628.176	10	84.790.994	10	98.770.093	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			195	10		10		10		10		10		
1.05.01.2.07.0009 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0		160.800.820		0		100.000.000		0	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	666.557.802	1	0	0	1	160.800.820	0	0	1	100.000.000	0	0	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	0		1		0		1		0		
1.05.01.2.07.0010 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							233.140.973		836.498.659		741.060.991		489.303.412		321.927.284	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	38	166.632.803	2	12	233.140.973	14	836.498.659	16	741.060.991	18	489.303.412	20	321.927.284	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	38		2	12		14		16		18		20		
1.05.01.2.07.0011 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							50.000.000		400.000.000		200.000.000		400.000.000		100.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	50.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	1	100.000.000	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			0	1		2		1		2		1		
1.05.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				600.327.860			2.901.535.130		3.207.394.324		3.544.702.648		3.560.675.127		3.617.009.518	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang selesai ditindaklanjuti	%	100	600.327.860		100	2.901.535.130	100	3.207.394.324	100	3.544.702.648	100	3.560.675.127	100	3.617.009.518	
1.05.01.2.08.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			0	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							468.227.250		526.755.656		592.600.113		592.675.127		600.009.518	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	433.932.420	12	12	468.227.250	12	526.755.656	12	592.600.113	12	592.675.127	12	600.009.518	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	12		12		12		12		12		
1.05.01.2.08.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			0	12		12		12		12		12		
1.05.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							2.413.307.880		2.654.638.668		2.920.102.5s35		2.930.000.000		2.973.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	166.395.440	12	12	2.413.307.880	12	2.654.638.668	12	2.920.102.5s35	12	2.930.000.000	12	2.973.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	12		12		12		12		12		
1.05.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.353.771.420			843.808.922		1.069.812.955		1.264.136.533		1.093.142.700		1.331.876.363	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan	%	100	2.353.771.420		100	843.808.922	100	1.069.812.955	100	1.264.136.533	100	1.093.142.700	100	1.331.876.363	
1.05.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							50.554.000		58.137.100		66.857.665		70.886.315		88.419.262	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.910.050	1	1	50.554.000	1	58.137.100	1	66.857.665	1	70.886.315	1	88.419.262	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							354.625.483		407.819.305		468.992.201		489.341.031		620.242.186	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	948.368.610	45	21	354.625.483	21	407.819.305	21	468.992.201	21	489.341.031	21	620.242.186	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			45	21		21		21		21		21		
1.05.01.2.09.0005 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel							2.045.250		2.300.906		2.588.519		2.912.084		3.276.094	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	1.454.400	3	25	2.045.250	35	2.300.906	40	2.588.519	45	2.912.084	50	3.276.094	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			3	25		35		40		45		50		
1.05.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							38.252.745		42.078.020		46.285.822		50.914.404		56.005.844	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	28.663.478	31	4	38.252.745	4	42.078.020	4	46.285.822	4	50.914.404	4	56.005.844	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			31	4		4		4		4		4		
1.05.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							292.749.603		454.052.523		510.809.088		360.660.224		363.825.755	
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.266.660.565	3	2	292.749.603	2	454.052.523	2	510.809.088	2	360.660.224	2	363.825.755	
	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			3	2		2		2		2		2		
1.05.01.2.09.0010 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							93.711.201		105.425.101		118.603.238		118.428.642		100.107.222	

Bidang Urusan/Program/Outcome Kegiatan/Output Sub kegiatan/Output	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024		Tahun											Ket
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	101	68.714.317	83	95	93.711.201	105	105.425.101	110	118.603.238	115	118.428.642	120	100.107.222	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit			83	95		105		110		115		120		
1.05.01.2.09.0011 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							11.870.640		0		50.000.000		0		100.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0		1	11.870.640	0	0	2	50.000.000	0	0	2	100.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1		0		2		0		2		

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Diantara subkegiatan tersebut, terdapat prioritas subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Meningkatnya Kualitas Pencegahan Kebakaran 2. Meningkatnya Kesiapan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 3. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 4. Meningkatnya Kesiapan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran danPenyelamatan (SKIK)	
			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kegiatan
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Sub kegiatan
			Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	
			Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Investigasi Kejadian Kebakaran	Kegiatan
			Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	Sub kegiatan
			Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kegiatan
			Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Sub kegiatan
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	
			Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kegiatan
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Sub kegiatan
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

4.4 Rencana Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang termasuk dinas penghasil pendapatan sehingga memiliki target pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rencana Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

No	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	Target Tahun (Rp)					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pendapatan Asli Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	50.000.000	57.245.000	61.252.150	65.539.801	70.127.587	75.036.518	

4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Damkar Kota Semarang yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Semarang. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran	%	(89,45% + 100%)/ 2 = 94,725 %	(89,46% + 100%)/ 2 = 94,73%	(89,47% + 100%)/ 2 = 94.735 %	(89,48% + 100%)/ 2 = 94.74%	(89,49% + 100%)/ 2 = 94.745 %	(89,50 % + 100%) /2 = 94.75 %	DO/Rumus: (Jumlah layanan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit / jumlah kejadian kebaakran yang ditangani di Kota Semarang) x 100% + (Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang terlaksana / jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang seharusnya diberikan) x 100% /2
2	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	%	100	100	100	100	100	100	DO/Rumus: (Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran + Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penyelamatan yang berkualitas) / (Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran + Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penyelamatan yang direncanakan) x 100%
3	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	%	100	5,1%	5,5%	6%	6,5%	7%	DO/Rumus: (Jumlah layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit oleh relawan pemadam kebaakran yang dibentuk dan/atau dibawah pembianaan Dinas Pemadam Kebakaran / Jumlah kejadian kebakaran di Kota Semarang) x 100%
4	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	%	100	48%	48,5%	49%	49,5%	50%	DO/Rumus: (Bangunan Gedung yang diperiksa memenuhi persyaratan pemasangan peralatan proteksi kebakaran / jumlah pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran) x 100%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Juni 2025

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menetapkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

a. Tingkat waktu tanggap kebakaran (*response time rate*) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran

- Tingkat waktu tanggap kebakaran (*response time rate*) yaitu waktu minimal yang diperlukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang (15 menit) dimulai saat diterimanya laporan kejadian kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian hingga sampai di lokasi kebakaran dan siap memberikan pertolongan pemadaman kebakaran serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$Response\ time\ rate = \frac{Jumlah\ pemadaman\ kebakaran\ \ oleh\ Dinas\ Pemadam\ Kebakaran\ \ sesuai\ response\ time\ 15\ menit}{Jumlah\ kejadian\ kebakaran\ \ di\ Kota\ Semarang} \text{x}100\%$$

- Layanan penyelamatan serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran yaitu layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kepada korban kebakaran maupun korban non kebakaran sesuai laporan yang diterima, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$Layanan\ Penyelamatan\ dan\ Evakuasi = \frac{\begin{array}{c}Jumlah\ layanan\ penyelamatan\ dan\ evakuasi \\ pada\ kondisi\ membahayakan\ manusia\ \ yang\ terlaksana\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ layanan\ penyelamatan\ dan\ evakuasi \\ pada\ kondisi\ membahayakan\ manusia\ yang\ seharusnya\ diberikan\end{array}} \text{x}100\%$$

- Tingkat waktu tanggap kebakaran (*response time rate*) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran dihitung menggunakan rumus:

$$= \frac{response\ time\ rate + layanan\ \ penyelamatan\ dan\ evakuasi}{2}$$

b. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan

Persentase Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar, dihitung dengan formulasi berikut:

$$= \frac{\begin{array}{c}Jumlah\ dokumen\ pengadaan\ dan\ pemeliharaan\ sarpras\ pemadaman\ kebakaran\ + \\ Jumlah\ dokumen\ pengadaan\ dan\ pemeliharaan\ sarpras\ penyelamatan\ \ yang\ berkualitas\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ dokumen\ pengadaan\ dan\ pemeliharaan\ sarpras\ pemadaman\ kebakaran\ + \\ Jumlah\ dokumen\ pengadaan\ dan\ pemeliharaan\ sarpras\ penyelamatan\ \ yang\ direncanakan\end{array}} x100\%$$

c. Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yaitu partisipasi masyarakat dan relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran secara formal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\begin{array}{c}Jumlah\ pemadaman\ kebakaran\ oleh\ masyarakat \\ dan\ Relawan\ Pemadam\ Kebakaran\ sesuai\ response\ time\ 15\ menit\end{array}}{Jumlah\ kejadian\ kebakaran\ di\ Kota\ Semarang} \text{x}100\%$$

d. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran

Persentase bangunan gedung yang telah memasang proteksi kebakaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dapat berfungsi dengan baik, dihitung dengan formulasi berikut:

$$= \frac{\begin{array}{c}Bangunan\ gedung\ yang\ telah\ memasang\ proteksi\ kebakaran \\ sesuai\ dengan\ yang\ dipersyaratkan\ dan\ dapat\ berfungsi\ dengan\ baik\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ pemeriksaan\ proteksi\ kebakaran \\ pada\ bangunan\ gedung\ yang\ dilaksanakan\end{array}} x100\%$$

4.6 Indikator Kinerja Kunci

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	DO: (Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan pemadam kebakaran / jumlah kejadian kebakaran di Kota Semarang) x 100%
2	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15	15	DO: Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran

Sumber: Permendagri No 18 tahun 2020

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu perbandingan jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran ditambah jumlah layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan pemadam kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dengan jumlah kejadian kebakaran di Kota Semarang, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ pemadaman\ kebakaran\ oleh\ masyarakat\ dan\ Relawan\ Pemadam\ Kebakaran\ sesuai\ response\ time\ 15\ menit}{Jumlah\ kejadian\ kebakaran\ di\ Kota\ Semarang} x100\%$$

$$+$$

$$= \frac{Jumlah\ pemadaman\ kebakaran\ oleh\ masyarakat\ dan\ Relawan\ Pemadam\ Kebakaran\ sesuai\ response\ time\ 15\ menit}{Jumlah\ kejadian\ kebakaran\ di\ Kota\ Semarang} x100\%$$

$$/2$$

b. Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran yaitu rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh, dan kesiapan pemadam kebakaran dalam satuan menit, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$response\ time\ = \frac{jumlah\ waktu\ tanggap\ (menit)}{jumlah\ kejadian\ kebakaran\ di\ Kota\ Semarang}$$

BAB V
PENUTUP

Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Terkait hal tersebut, saat penyusunan Renja Damkar Kota Semarang Tahun 2026 dokumen Renstra Tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Maka Renja disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Damkar Tahun 2025-2029, serta RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD disusun dengan mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 periode pertama, serta memperhatikan Visi, Misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2025-2030. Adapun Renja Damkar Tahun 2026 tersebut akan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Damkar Tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Damkar Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan serta sub kegiatan, agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Damkar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Seluruh personil Damkar beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Damkar Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Damkar Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
c. Untuk penjabaran Renstra Damkar Tahun 2025-2029 lebih lanjut, akan disusun Renja Damkar pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Damkar Kota Semarang.

Sebagai penutup, Renstra Damkar Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Damkar beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan

sasaran Damkar secara berkesinambungan; yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Damkar Kota Semarang.

9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sabagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan kebencanaan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tamabhan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor

114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan kebencanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan kebencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, tugas pokok dari Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan kebencanaan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mempunyai fungsi:

1) perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan
5) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien
6) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
7) penyelenggaraan kesekretariatan Badan
8) penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB
9) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB
10) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
11) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SEMARANG

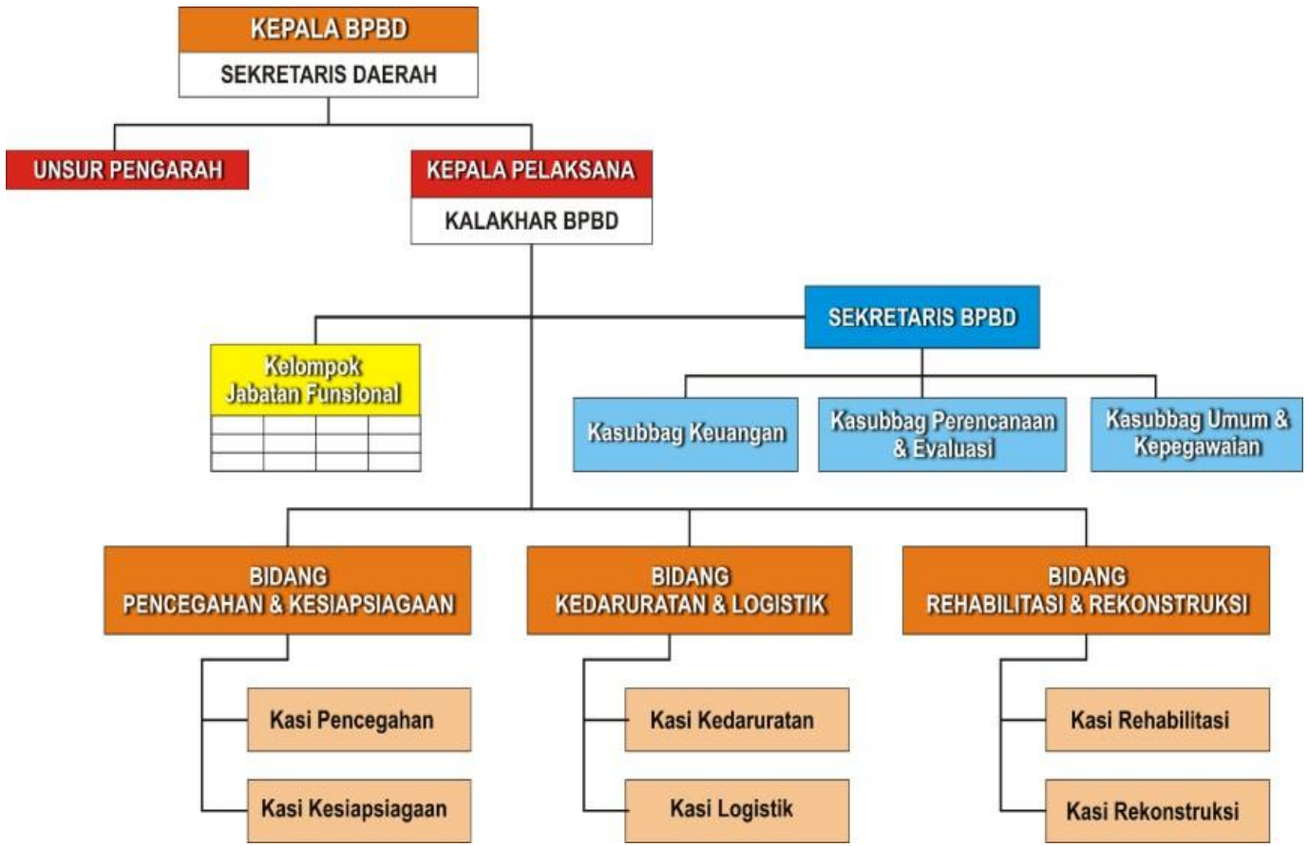

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana Harian Badan

Kepala Pelaksana Harian Badan memiliki tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian Badan. Sebagai pemimpin sekretariat, sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB. Seorang sekretaris juga diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugasnya seperti pada penjelasan di atas, sekretariat memiliki fungsi:

a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran
b). pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c). pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB
d). pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB
e). pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait
f). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Badan
g). pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Badan
h). pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
i). pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan
j). pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
k). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan
l). pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Badan
m). pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan
n). pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan

o). pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan
p). pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan
q). pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan
r). pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan
s). pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan
t). pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/ pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan
u). pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan
v). pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan
w). pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan
x). pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan
y). pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan
z). pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sekretariat BPBD Kota Semarang terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah (dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris)

   Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

   1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
   2) menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
   3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
   4) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
   5) menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
   6) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan
   7) menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Badan
   8) menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan
   9) menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan
   10) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Badan
   11) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
12) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian (dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris)

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian
2) menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian
5) menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan.
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan.
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan.
8) menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan.
9) menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan.
10) menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan.
11) menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan
12) menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan
14) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan
15) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian
16) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian
17) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
18) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi (pelaksana fungsi dan kegiatan perencanaan dan evaluasi, dipimpin oleh Pejabat

Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris)

Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi
2) menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi
5) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Badan
6) menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan
7) menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Badan
8) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
9) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi
10) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi
11) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi
12) melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Tugas dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kepala bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran
b). pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c). pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
d). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
e). pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
f). pelaksanaan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
g). pelaksanaan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana

h). pelaksanaan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tibatiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana
i). pelaksanaan bahan penguatan ketahanan sosial masyarakat
j). pelaksanaan bahan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana
k). pelaksanaan bahan penyusunan peta resiko bencana
l). pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana
m). pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana
n). pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana
o). pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu
p). pelaksanaan bahan penyusunan rencana aksi daerah
q). pelaksanaan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
r). pelaksanaan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
s). pelaksanaan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
t). pelaksanaan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
u). pelaksanaan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi
v). pelaksanaan bahan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
w). pelaksanaan bahan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana
x). pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana
y). pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana
z). pelaksanaan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi berkaitan dengan daerah rawan bencana
aa. pelaksanaan pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana
bb. pelaksanaan bimbinginan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan
cc. pelaksanaan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer)
dd. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
ee. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
ff. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
gg. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:

a. Subkoordinator Pencegahan

Subkoordinator Pencegahan mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pencegahan
2) menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pencegahan
5) menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
6) menyiapkan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
7) menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana
8) menyiapkan bahan penguatan ketahanan sosial masyarakat
9) menyiapkan bahan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana
10) menyiapkan bahan penyusunan peta resiko bencana
11) menyiapkan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana
12) menyiapkan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana
13) menyiapkan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana
14) menyiapkan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu
15) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pencegahan
16) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pencegahan
17) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan
18) melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
19) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Subkoordinator Kesiapsiagaan

Subkoordinator Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kesiapsiagaan
2) menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kesiapsiagaan
5) menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi penanggulangan daerah
6) menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
7) menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini

8) menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
9) menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
10) menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi
11) menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
12) menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana
13) menyiapkan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana
14) menyiapkan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana
15) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi berkaitan dengan daerah rawan bencana
16) menyiapkan pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana
17) menyiapkan bimbinginan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan
18) menyiapkan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer)
19) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pencegahan
20) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Kesiapsiagaan
21) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan
22) melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Kedaruratan dan Logistik. Dalam hal ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik juga mengemban tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran
b). pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c). pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
d). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik
e). pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

f). pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana
g). pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
h). pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar
i). pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan
j). pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
k). pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana
l). pelaksanaan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana
m). pelaksanaan bahan peralatan evakuasi bencana
n). pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi
o). pelaksanaan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang logistic
p). pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana
q). pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana
r). pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Kedaruratan dan Logistik
s). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Kedaruratan dan Logistik
t). pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan
u). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:

a. Subkoordinator Kedaruratan

Subkoordinator Kedaruratan mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kedaruratan
2) menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kedaruratan
5) menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
6) menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaaan darurat bencana
7) menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
8) menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar
9) menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan
10) menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
11) menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana
12) menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana
13) menyiapkan bahan peralatan evakuasi bencana
14) menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait

dalam penyimpanan tempat evakuasi
15) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Kedaruratan
16) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan kegiatan Kedaruratan
17) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kedaruratan
18) melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
19) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Subkoordinator Logistik

Subkoordinator Logistik mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Logistik
2) menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Logistik
5) pelaksanaan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang logistik
6) pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, darana prasarana tanggap darurat penanganan bencana
7) pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana
8) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Logistik
9) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan kegiatan Logistik
10) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Logistik
11) melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga memiliki amanat untukmengemban tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
e. pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana
f. pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum
g. pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

h. pelaksanan pemulihan sosial psikologis
i. pelaksanaan pelayanan kesehatan
j. pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik
k. pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya
l. pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban
m. pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan
n. pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik
o. pelaksanaan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan
p. pelaksanaan bahan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana
q. pelaksanaan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana
r. pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana
s. pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
t. pelaksanaan pembangiktan kembali kehidupan sosial bidaya masyarakat
u. pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
v. pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
w. pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
x. pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan public
y. pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
z. pelaksanaan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait
aa. pelaksanaan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat
bb. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
cc. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dd. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
ee. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:

a. Subkoordinator Rehabilitasi

Subkoordinator Rehabilitasi mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rehabilitasi
2) menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Rehabilitasi
5) menyiapkan kegiatan perbaikan koordinator dan fasilitas lingkungan daerah bencana
6) menyiapkan kegiatan perbaikan koordinator dan fasilitas prasarana dan sarana umum
7) menyiapkan kegiatan pemberian koordinator dan fasilitas bantuan perbaikan rumah masyarakat
8) menyiapkan kegiatan pemulihan sosial psikologis
9) menyiapkan kegiatan koordinator dan fasilitas pelayanan kesehatan

10) menyiapkan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik
11) menyiapkan kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya
12) menyiapkan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban
13) menyiapkan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan
14) menyiapkan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan public
15) menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan
16) menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana
17) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana
18) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Rehabilitasi
19) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Rehabilitasi
20) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi
21) melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
22) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Subkoordinator Rekonstruksi

Subkoordinator Rekonstruksi mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rekonstruksi
2) menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan rekonstruksi
5) menyiapkan fasilitasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana
6) menyiapkan fasilitasi kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
7) menyiapkan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
8) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
9) menyiapkan kegiatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
10) menyiapkan kegiatan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
11) menyiapkan kegiatan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
12) menyiapkan kegiatan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait
13) menyiapkan kegiatan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat
14) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Rekonstruksi
15) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Rekonstruksimenyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi

16) melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

2.1.1 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam tingkat/kualifikasi pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	7	-	15	2	23
4	D3	1	4	2	-	7
5	S1	14	2	7	5	27
6	S2	8	1	-	-	8
7	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	30	7	25	7	69

Dari jumlah pegawai sebanyak 69 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	6	3	9
2	Golongan III	20	5	25
3	Golongan IV	3	1	4
	Jumlah	29	9	38

2.1.2 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarangberasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Terminal	1.933,40									

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	B	487,5					
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	270					
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	2.398					
4	Pagar Permanen	B	2.398					

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang berdasarkan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan kebencanaan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Tujuan dan Sasaran																		
1	Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	nilai	-	-	139,84	113	111	109	107	115,52	108,63	103,49	99,41	94,31	121,05	104,02	107,25	109,64	113,45
2	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP	nilai	-	-	73,12	73,12	73,12	73,12	73,5	73,96	73,96	71,61	72,10	72,50	101,15	101,15	97,93	98,60	98,63
	Indikator kinerja kunci																		
1	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	evakuasi korban bencana																		
	Indikator SPM																		
1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	ersentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator TPB																		
1	Kelurahan Siaga Bencana (renja)	kelurahan	-	-	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	100	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan bagi korbanbencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	orang	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	wilayah	-	-	15	15	15	24	26	15	15	15	24	26	100	100	100	100	100
5	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Jumlah kota (kelurahan) tangguh bencana yang terbentuk.	keluraha n	-	-	22	27	28	34	35	22	27	28	34	35	100	100	100	100	100

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penanggulangan Bencana	15,455,297,441	15.455.297.441	4,121,584,807	6.673.026.798	5.041.964.126	14,694,110,829	14.694.110.829	3,802,519,615	6.169.055.546	4.895.219.351	95.07	95,07	92.26	92,45	97,09	9,788,441,124	9,248,315,222
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	8.820.384.228	8.772.193.871	8,704,990,675	9.612.320.392	9.293.288.603	8.312.419.209	8.226.216.409	8,316,306,644	8.877.966.149	8.865.472.010	93.78	93,78	95.53	92,36	95,40	8,738,592,273	8,473,496,401

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sebagai berikut:

1) Perubahan cuaca yang tak terduga.
2) Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya. sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana.
3) Koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar stakeholders belum maksimal.
4) Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas.
5) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengurangan risiko bencana.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana.
2) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
3) Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif.
4) Adanya jejaring/ kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas.
5) Semakin berkembanganya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan informasi kebencanaan secara cepat dan massif.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, tugas pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, dan setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis

gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang yaitu: "Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan"yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
"Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan	1. Penyediaan infrastruktur bagi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana belum optimal
		2. Penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase belum mencapai standar

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1) Penyediaan infrastruktur bagi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana belum optimal.
2) Penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase belum mencapai standar.

2.3.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Dokumen RPJMN 2025–2029 mengangkat sejumlah isu strategis global dan nasional yang berdampak langsung terhadap kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Secara global, tantangan utama meliputi perubahan iklim yang semakin ekstrem, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, serta urbanisasi cepat yang memperbesar risiko di wilayah perkotaan. Isu-isu ini menuntut pendekatan adaptif dan kolaboratif lintas negara dalam pengurangan risiko bencana. Di tingkat nasional, RPJMN menyoroti kerentanan wilayah terhadap bencana, ketimpangan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, serta rendahnya integrasi pengurangan risiko ke dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, minimnya literasi kebencanaan masyarakat, fragmentasi data risiko, dan keterbatasan pendanaan serta teknologi menjadi hambatan utama. RPJMN merespons isu-isu tersebut dengan mendorong penguatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta integrasi kebencanaan ke dalam tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen nasional untuk membangun ketahanan bencana yang inklusif dan berbasis risiko.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan

kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi dan misi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Berdasarkan misi dalam RPJMD, dalam rangka penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan kebencanaan, maka BPBD Kota Semarang mendukung tercapaianya Misi Ke-6 yakni Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat, dengan tujuan Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya secara spesifik dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan kebencanaan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Indeks Risiko Bencana.

c. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2025-2029 menunjukkan arah kebijakan nasional penanggulangan bencana yang semakin menekankan pendekatan sistemik, inklusif, dan berbasis risiko, yang relevan bagi Kota Semarang sebagai wilayah dengan kompleksitas

ancaman bencana seperti banjir rob, tanah longsor, dan gempa bumi. Renstra ini mendorong penguatan kapasitas kelembagaan daerah, integrasi data risiko ke dalam perencanaan tata ruang, serta pelibatan masyarakat dan teknologi dalam sistem peringatan dini. Strategi nasional ini juga membuka peluang bagi Semarang untuk mengakses dukungan program seperti penguatan desa tangguh bencana, revitalisasi infrastruktur adaptif, dan peningkatan koordinasi lintas sektor, sejalan dengan visi kota yang resilien dan berkelanjutan.

d. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengahyang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah adalah peningkatan kapasitas penanganan darurat dan analisis kebencanaan, yang diwujudkan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana secara adil dan setara, dengan sasaran utama menurunkan angka kematian akibat bencana di masyarakat.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kapasitas Penanganan Darurat
   - BPBD Provinsi berupaya keras untuk meminimalkan dampak bencana, serta mempercepat dan meningkatkan efektivitas penanganan saat bencana terjadi.
   - Hal ini juga mencakup upaya untuk membangun kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana
2) Pengurangan Kerugian Akibat Bencana
   - Salah satu sasaran utamanya adalah menekan angka kerugian materiel dan kerugian jiwa (angka kematian) akibat bencana, sehingga dapat ditingkatkan jumlah aset yang terselamatkan.
3) Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Tertib
   - BPBD Provinsi bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dari berbagai ancaman bencana dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman sosial, politik, ekonomi, dan bencana alam.
4) Penguatan Koordinasi dan Kebijakan
   - BPBD Provinsi akan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan BNPB untuk memastikan penanggulangan bencana yang lebih terarah dan efektif.
   - Penyusunan dan implementasi kebijakan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, hingga pasca bencana akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dijabarkan sebagai berikut:

No.	Wilayah/ Kawasan Strategis	Program Utama	Tujuan	Periode Pelaksanaan	Keterangan
1.	Kawasan Pesisir Utara (Tanjung Emas – Genuk)	Peningkatan tanggul laut dan sistem polder	Mengurangi risiko banjir rob dan penurunan muka tanah	2025–2027	Terintegrasi dengan program nasional NCICD
2.	Kawasan Perkotaan Inti (Simpang Lima – Tugu Muda)	Revitalisasi ruang publik dan transportasi massal	Meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas warga	2025–2029	Sinkron dengan RPJMD dan Rencana Induk Transportasi
3.	Kawasan Perbukitan Selatan (Gunungpati)	Pengembangan kawasan konservasi dan agrowisata	Menjaga daya dukung lingkungan dan ekonomi lokal	2026–2029	Berbasis partisipasi masyarakat
4.	Kawasan Industri (Wijayakusuma, Genuk)	Modernisasi infrastruktur industri hijau	Mendorong investasi berkelanjutan	2025–2028	Memenuhi standar emisi dan efisiensi energi
5.	Koridor Transportasi Barat–Timur	Peningkatan jaringan jalan dan angkutan umum	Memperkuat konektivitas antar wilayah	2025–2029	Terhubung dengan jalur logistik nasional

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah terkait Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim dengan masalah strategis yakni Masih kurangnya ketahanan terhadap bencana.

Tabel 2.8.

Tema Isu KLHS terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim	1. Masih kurangnya ketahanan terhadap Bencana
	2. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana
	3. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
	4. Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim

Tabel 2.9.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
1.5.2.(a) 11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	5.250	5.249,5	5.249	5.248,5	5.248	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1. Meningkatkan mitigasi bencana melalui Kesiapsiagaan bencana dan Perencanaan pembangunan berbasis bencana 2. Meningkatkan mitigasi bencanaMelalui kesiapsiagaan bencana dan perencanaan pembangunan berbasis bencana

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

2.3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu- isu strategis pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Isu Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Pengembangan pembinaan program kampung iklim (proklim) di wilayah pemukiman dan sekolah-sekolah di Kota Semarang • Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam tanggap bencana • Pembangunan infrastruktr pendukung kesiapsiagaan bencana di lokasi rawan bencana	Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan	Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan iklim	Perubahan iklim	Krisis lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Optimalisasi infrastruktur dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, 2025

2.3.4 Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender dalam Kebencanaan di Kota Semarang

Pengarusutamaan gender dalam kebencanaan adalah pendekatan strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses penanggulangan bencana dari perencanaan hingga pemulihan memperhitungkan kebutuhan, peran, dan kerentanan yang berbeda antara laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok disabilitas. Dalam konteks Indonesia, kebijakan seperti Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 dan berbagai panduan GEDSI telah mendorong integrasi prinsip kesetaraan dan inklusi ke dalam sistem kebencanaan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang aman dan terpisah di pengungsian, distribusi bantuan yang adil, serta pelibatan aktif perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan.

Namun, tantangan masih muncul dalam bentuk bias struktural, kurangnya data terpilah gender, dan minimnya kapasitas institusi untuk menerapkan pendekatan ini secara konsisten. Digitalisasi sistem kebencanaan membuka peluang besar untuk mengintegrasikan analisis gender ke dalam perencanaan berbasis data, seperti dalam kajian risiko dan sistem informasi bencana. Dengan memastikan bahwa respons bencana bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok, pengarusutamaan gender tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial jangka panjang.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) telah mulai diintegrasikan dalam kebijakan kebencanaan Kota Semarang, terutama melalui dokumen strategis seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Semarang 2023–2027. Dalam dokumen ini, pendekatan inklusif dan partisipatif menjadi bagian dari strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan layanan yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan—perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Meskipun belum disebutkan secara eksplisit sebagai PUG atau ARG, prinsip-prinsipnya tercermin dalam arah kebijakan dan program yang menekankan keadilan akses, partisipasi, dan perlindungan sosial.

Untuk ARG, mekanisme pendanaan dalam RPB Semarang mencakup pengelolaan dana pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana yang dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan responsif gender. Misalnya, penyediaan fasilitas pengungsian yang aman dan terpisah, pelatihan kesiapsiagaan berbasis komunitas, serta penguatan sistem informasi kebencanaan yang memungkinkan pelacakan data terpilah gender. Dengan digitalisasi dan pemetaan multibencana berbasis GIS, Semarang memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan analisis gender ke dalam sistem peringatan dini dan perencanaan kontinjensi. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa ARG benar-benar dioperasionalkan melalui indikator kinerja dan pelibatan aktif kelompok perempuan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan kebencanaan.

2.3.5 Kota Layak Anak dalam Kebencanaan di Kota Semarang

Kota Semarang sebagai wilayah yang memiliki potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan rob, perlu mengintegrasikan konsep kota layak anak ke dalam kebijakan penanggulangan bencana. Prinsip utama yang ditekankan adalah memastikan perlindungan anak sebagai kelompok rentan, baik sebelum, saat, maupun pascabencana. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas ramah anak di tempat pengungsian, pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan anak, serta pemenuhan hak mereka atas pendidikan dan ruang bermain meski dalam kondisi darurat.

Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 yang mengintegrasikan pemenuhan hak-hak anak ke dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan kota, termasuk penanganan risiko bencana. Dengan capaian penghargaan tingkat Nindya dan Utama pada 2025, Semarang telah memperkuat kelembagaan KLA lewat pembentukan forum anak di tiap kecamatan dan alokasi anggaran khusus untuk program anak. Instrumen ini memastikan pemerintah daerah memiliki kerangka kerja, sumber daya, dan mekanisme evaluasi yang terjadwal untuk menjamin partisipasi dan perlindungan anak dalam semua situasi, termasuk darurat bencana.

Pemerintah Kota Semarang bersama BPBD, dinas terkait, serta lembaga masyarakat dapat mengembangkan sistem mitigasi bencana yang ramah anak. Misalnya dengan penyusunan jalur evakuasi yang aman, pelatihan kesiapsiagaan di sekolah, serta penyediaan materi edukasi kebencanaan dengan bahasa dan media yang mudah dipahami anak. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan komitmen BPBD Kota Semarang dalam melibatkan anak dalam kebencanaan. Upaya ini tidak hanya menempatkan anak sebagai penerima perlindungan, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan simulasi dan forum anak, sehingga terbangun budaya sadar bencana sejak dini.

Lebih jauh, mewujudkan kota layak anak dalam kebencanaan juga

berarti memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjamin perlindungan anak di setiap tahap penanggulangan bencana. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta organisasi kemanusiaan sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar responsif terhadap kebutuhan anak. Dengan pendekatan ini, Kota Semarang dapat menjadi kota yang tangguh bencana sekaligus ramah anak, sehingga hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi tetap terpenuhi meskipun dalam situasi darurat.

2.3.6 Posyandu 6 SPM dalam Kebencanaan di Kota Semarang

Posyandu sebagai simpul layanan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara responsif dan inklusif dan kelompok rentan, khususnya ibu hamil, bayi, dan balita. Posyandu tidak hanya berfungsi untuk pelayanan kesehatan rutin, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan ketahanan keluarga terhadap risiko bencana. Misalnya, pemantauan gizi anak, imunisasi, serta edukasi kesehatan ibu dan anak dapat membantu memperkuat daya tahan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat, sehingga risiko gizi buruk atau penyakit akibat bencana dapat ditekan.

Dalam situasi bencana, Posyandu dapat diarahkan menjadi pusat layanan darurat yang tetap memberikan pelayanan dasar sesuai SPM, seperti imunisasi, deteksi dini masalah gizi, serta layanan kesehatan reproduksi bagi ibu. Posyandu juga bisa menjadi simpul informasi kebencanaan yang menjangkau langsung keluarga, sehingga edukasi tentang kesiapsiagaan, pola asuh anak saat darurat, hingga penyediaan pangan sehat tetap berkesinambungan. Dengan dukungan kader Posyandu yang terlatih dalam kesiapsiagaan bencana, layanan dasar ini tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi terbatas.

Dengan demikian, integrasi Posyandu 6 SPM dalam perspektif kebencanaan di Kota Semarang berarti menempatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana. Selain memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga, Posyandu juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun ketangguhan keluarga. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Semarang sebagai kota yang tangguh bencana sekaligus ramah terhadap kebutuhan kelompok rentan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten/Kota..xx berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi ke-6 yakni Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas penanganan bencana dengan indikator Indeks ketahanan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya cakupan layanan penanganan bencana daerah dengan indicator Persentase penanganan bencana.
2. Meningkatnya kinerja BPBD dengan dua indikator yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	DATABASE	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan	Meningkatnya kualitas penanganan bencana		Indeks ketahanan daerah	Perhitungan nilai IKD	Indeks	0,65	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	
		Meningkatnya cakupan layanan penanganan bencana Daerah	Persentase penanganan bencana	(Jumlah bencana yang ditangani pada tahun n dibagi jumlah bencana yang terjadi pada tahun n) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai dengan pedoman Kemenpan	Nilai	72,5	73,5	73,7	74	74,3	74,5	75	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai dengan pedoman Kemenpan	Nilai	95	95	95	95	95	95	95	

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing- masing sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Startegi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan kapasistas dan sistem penanganan bencana yang berkualitas melalui manajemen penanganan bencana secara terpadu	Peningkatan kapasistas dan sistem penanganan bencana yang berkualitas melalui manajemen penanganan bencana secara terpadu	Penguatan kapasistas dan sistem penanganan bencana yang berkualitas melalui manajemen penanganan bencana secara terpadu	Akselerasi kapasistas dan sistem penanganan bencana yang berkualitas melalui manajemen penanganan bencana secara terpadu	Perwujudan efektivitas manajemen penanganan bencana secara terpadu

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
	Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bersih, Asri, Ramah, Tangguh, dan Nyaman	Pengurangan Resiko bencana berbasis Komunitas	Difokuskan pada kawasan kelurahan yang rawan bencana
			Pelayanan Informasi di daerah rawan bencana	• Dokumen KRB, RPB dan Rencana Kontigensi Bencana di Kota Semarang • Pengembangan Early Warning System (EWS)
			Peningkatan upaya penanganan pasca bencana	• Kajian Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dampak bencana
			Pemberian bantuan dan penyelamatan serta evakuasi korban bencana secara cepat dan tepat	• Respon time penanganan bencana • Pembentukan Forum relawan di daerah rawan bencana
			Peningkatan kapasitas kelembagaan	• Peningkatan Sumber Daya Manusia • Peningkatan Sarana Prasarana perkantoran • Peningkatan kinerja administrasi da pelaporan keuangan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBENCANAAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan	Meningkatnya kualitas penanganan bencana		Meningkatnya efektivitas manajemen penanganan bencana secara terpadu	Responsivitas penanganan bencana	Indeks ketahanan daerah		
		Meningkatnya cakupan layanan Penanganan bencana daerah	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Terlayaninya masyarakat korban yang terdampak bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		
					Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
					Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi kebencanaan melalui sosial media	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Sub Kegiatan : Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Sub Koordinator Pencegahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
				Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Sub Kegiatan : Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/ Kota	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Sub Kegiatan : Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
			Peningkatan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik		Persentase Penanganan Tanggap Darurat	PROGRAM PENANGGULANGAN	Bidang Kedaruratan dan Logistik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			saat terjadi bencana		Bencana	BENCANA	
				Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Berhasil dievakuasi	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Sub Kegiatan : Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kedaruratan dan Logistik
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Logistik
			Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rehabiltasi dan Rekonstruksi
				Peningkatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	Sub Kegiatan : Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Subkoordinator Rehabilitasi
					Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Subkoordinator Rekonstruksi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Kab/Kota		
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meberikan pelayanan	Pemberian pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang prima	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sekretaris
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan : Administrasi keuangan pereangkat daerah	Sekretaris BPBD
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan	Sub Kegiatan : Koordinasi dan	Sub Koordinator

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Penanggulangan Bencana Daerah		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretaris
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Penanggulangan	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaris

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bencana Daerah		
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Unit Kendaraan	Sub Kegiatan : Pengadaan	Kepala Sub Bagian Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana yang selesai ditindaklanjuti	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Perizinannya	Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang, Pemetaan risiko bencana, Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor, serta Penguatan kelembagaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Nama Program Prioritas sesuai nomenklatur adalah Program Penanggulangan Bencana. Selain itu sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan BPBD juga mendukung program prioritas Kepala Daerah dalam Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya, dengan nomenklatur program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Program Nomenklatur	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
	• Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang • Pemetaan risiko bencana • Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor, Penguatan kelembagaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				• Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Sub Koordinator Pencegahan
				• Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan
				2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
				• Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
				• Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
				• Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Sub Koordinator Kesiapsiagaan

No	Program Piroritas	Program Nomenklatur	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
`	• Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang • Pemetaan risiko bencana • Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor, • Penguatan kelembagaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Kedaruratan dan Logistik saat terjadi bencana	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
				• Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Sub Koordinator Kedaruratan
				• Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Logistik
			Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kepala Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi
				• Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Sub Koordinator Rehabilitasi
				• Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi passcabencana (R3P) Kab/Kota	Sub Koordinator Rekonstruksi
	• Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan • Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Penanggulangan Bencana Daerah "	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris BPBD
				• Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi
				• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi
				• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi
				• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi
				• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi

No	Program Piroritas	Program Nomenklatur	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretaris BPBD
				• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi
				• Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi
				• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi
				• Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Koordiantor Perencanaan dan Evaluasi
				3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretaris BPBD
				• Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaris BPBD
				• Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Program Piroritas	Program Nomenklatur	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				• Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris BPBD
				• Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris BPBD
				• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris BPBD
				• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Program Piroritas	Program Nomenklatur	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				• Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				• Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Badan enanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13,381,533,403		14,877,573,344		15,528,719,562		15,648,325,869		15,930,452,379	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2,730,090,303		3,018,921,913		3,144,634,874		3,167,726,558		3,222,195,060	
Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	-	100	1,430,090,303	100	1,573,921,913	100	1,660,000,000	100	1,677,726,558	100	1,708,235,560	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				262,000,000		290,000,000		310,000,000		324,634,874		325,692,000	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi kebencanaan melalui sosial media (%)	100	100	262,000,000	100	290,000,000	100	310,000,000	100	324,634,874	100	325,692,000	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)				125,000,000		140,000,000		140,000,000		150,000,000		150,000,000	Sub Koordinator Pencegahan
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (orang)	500	500	125,000,000	500	140,000,000	500	140,000,000	500	150,000,000	500	150,000,000	Sub Koordinator Pencegahan
1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota				137,000,000		150,000,000		170,000,000		174,634,874		175,692,000	Sub Koordinator Pencegahan
Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)	1	2	137,000,000	2	150,000,000	2	170,000,000	2	174,634,874	2	175,692,000	Sub Koordinator Pencegahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1,168,090,303		1,283,921,913		1,350,000,000		1,353,091,684		1,382,543,560	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	100	1,168,090,303	100	1,283,921,913	100	1,350,000,000	100	1,353,091,684	100	1,382,543,560	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				350,000,000		450,000,000		350,000,000		480,000,000		430,000,000	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (unit)	3	2	350,000,000	2	450,000,000	2	350,000,000	2	480,000,000	2	430,000,000	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				500,000,000		350,000,000		500,000,000		350,000,000		557,000,000	Sub Koordinator Kesiapsiagaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (kawasan)	1	10	500,000,000	10	350,000,000	10	500,000,000	10	350,000,000	10	557,000,000	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				213,090,303		350,000,000		350,000,000		373,091,684		263,538,000	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (kawasan)	2	3	213,090,303	3	350,000,000	3	350,000,000	3	373,091,684	3	263,538,000	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				105,000,000		133,921,913		150,000,000		150,000,000		132,005,560	Sub Koordinator Kesiapsiagaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	2	2	105,000,000	2	133,921,913	2	150,000,000	2	150,000,000	2	132,005,560	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
Meningkatnya Pelayanan Kedaruratan dan Logistik saat terjadi bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)		100	655,000,000	100	700,000,000	100	719,634,874	100	725,000,000	100	716,025,000	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				655,000,000		700,000,000		719,634,874		725,000,000		716,025,000	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Berhasil dievakuasi (%)	100	100	655,000,000	100	700,000,000	100	719,634,874	100	725,000,000	100	716,025,000	
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota				305,000,000		350,000,000		344,634,874		350,000,000		350,000,000	Sub Koordinator Kedaruratan
Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	250	1000	305,000,000	1125	350,000,000	1250	344,634,874	1250	350,000,000	1500	350,000,000	Sub Koordinator Kedaruratan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (dokumen)												
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				350,000,000		350,000,000		375,000,000		375,000,000		366,025,000	Sub Koordinator Kedaruratan
Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (dokumen)	250	1000	350,000,000	1125	350,000,000	1250	375,000,000	1250	375,000,000	1500	366,025,000	Sub Koordinator Kedaruratan
Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)		100	645,000,000	100	745,000,000	100	765,000,000	100	765,000,000	100	797,934,500	Kepala Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				645,000,000		745,000,000		765,000,000		765,000,000		797,934,500	Kepala Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi
Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana (%)	100	100	645,000,000	100	745,000,000	100	765,000,000	100	765,000,000	100	797,934,500	
1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				395,000,000		395,000,000		395,000,000		395,000,000		578,319,500	Sub Koordinator Rehabilitasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan (kegiatan)	12	12	395,000,000	12	395,000,000	12	395,000,000	12	395,000,000	12	578,319,500	Sub Koordinator Rehabilitasi
1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				250,000,000		350,000,000		370,000,000		370,000,000		219,615,000	Sub Koordinator Rekonstruksi
Terlaksananya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)	1	1	250,000,000	1	350,000,000	1	370,000,000	1	370,000,000	1	219,615,000	Sub Koordinator Rekonstruksi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				10,651,443,100		11,858,651,431		12,384,084,688		12,480,599,311		12,708,257,319	Sekretaris
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan BPBD yang berkualitas (%)		100	8,635,088,302	100	9,111,524,671	100	9,555,173,602	100	9,968,270,453	100	10,480,234,888	Sekretaris
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,756,326		56,282,960		56,924,984		12,475,911		28,408,057	Sekretaris
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (%)	100	100	6,756,326	100	56,282,960	100	56,924,984	100	12,475,911	100	28,408,057	Sekretaris
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,506,800		2,835,614		3,267,077		3,593,787		4,287,055	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	3	1,506,800	3	2,835,614	3	3,267,077	3	3,593,787	4	4,287,055	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				550,000		577,500		606,376		636,693		668,528	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	1	550,000	1	577,500	1	606,376	1	636,693	1	668,528	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				600.000		630.000		661.500		694.575		729.304	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	-	1	600.000	1	630.000	1	661.500	1	694.575	1	729.304	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				550,000		577,500		606,376		636,693		668,528	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	1	550,000	1	577,500	1	606,376	1	636,693	1	668,528	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				600.000		630.000		661.500		694.575		729.304	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	-	1	600.000	1	630.000	1	661.500	1	694.575	1	729.304	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				569,600		626,560		689,216		758,138		833,951	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	569,600	2	626,560	2	689,216	2	758,138	2	833,951	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2,000,000		50,000,000		50,000,000		5.000.000		20,000,000	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	1	1	2,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	5.000.000	1	20,000,000	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.628.331.976		9.055.241.711		9.498.248.619		9.963.407.727		10.451.826.831	Sekretaris

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan (%)	100	100	8.628.331.976	100	9.055.241.711	100	9.498.248.619	100	9.963.407.727	100	10.451.826.831	Sekretaris
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8,437,520,302		8,859,396,317		9,302,366,133		9,767,484,440		10,255,858,662	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	42	70	8,437,520,302	70	8,859,396,317	70	9,302,366,133	70	9,767,484,440	70	10,255,858,662	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				190,000,000		195,000,000		195,000,000		195,000,000		195,000,000	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	190,000,000	12	195,000,000	12	195,000,000	12	200,000,000	12	195,000,000	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				337,200		370,920		408,012		448,813		493,695	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1	337,200	1	370,920	1	408,012	1	448,813	1	493,695	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				137,274		137,274		151,001		166,102		182,712	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	0	12	137,274	12	137,274	12	151,001	12	166,102	12	182,712	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				337,200		337,200		337,200		337,200		337,200	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	1	1	337,200	1	337,200	1	337,200	1	337,200	1	337,200	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (%)	-	100	2,016,354,798	100	2,747,126,760	100	2.828.911.085	100	2.504.715.673	100	2.228.022.431	Sekretaris
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4,000,000		129,000,000		95,000,000		15,000,000		10,000,000	Sekretaris
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (%)	-	100	4,000,000	100	129,000,000	100	95,000,000	100	15,000,000	100	10,000,000	Sekretaris
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		75,000,000		80,000,000		-		-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	-	-	-	75	75,000,000	75	80,000,000	-	-	-	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2,000,000		4,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	-	2	2,000,000	2	4,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2,000,000		50,000,000		10,000,000		10,000,000		5,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	-	2	2,000,000	70	50,000,000	70	10,000,000	70	10,000,000	70	5,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				247.107.314		523.574.544		510,600,000		430.289.005		308.012.500	Sekretaris
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (%)	100	100	247.107.314	100	523.574.544	100	510,600,000	100	430.289.005	100	308.012.500	Sekretaris

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20,000,000		27,500,000		27,500,000		30,000,000		20,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2	2	20,000,000	2	27,500,000	2	27,500,000	2	30,000,000	2	20,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25,000,000		95,574,544		42,350,000		25,000,000		25,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2	2	25,000,000	2	95,574,544	2	42,350,000	2	25,000,000	2	25,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30,000,000		55,000,000		60,000,000		66,550,000		63.205.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	6	3	30,000,000	3	55,000,000	3	60,000,000	3	66,550,000	3	63.205.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30,000,000		33,000,000		36,300,000		37.000.000		43,923,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	3	30,000,000	4	33,000,000	4	36,300,000	4	37.000.000	4	43,923,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	2	25,000,000	2	27,500,000	2	30,250,000	2	33,275,000	2	36,602,500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20,200,000		35,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	12	20,200,000	12	35,000,000	12	24,200,000	12	26,620,000	12	29,282,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		150,000,000		160,000,000		170.000.000		90,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	12	85.000.000	12	150,000,000	12	160,000,000	12	170.000.000	12	90,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				11,907,314		100,000,000		130,000,000		41,844,006		-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	3	1	11,907,314	3	100,000,000	3	130,000,000	3	41,844,006		-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000		90,000,000		148,745,047		45,000,000		10.000.000	Sekretaris
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional (%)	-	100	5.000.000	100	90,000,000	100	148,745,047	100	45,000,000	100	10.000.000	Sekretaris
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		45.000.000		108.745.047		40.000.000	-	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	-	-	-	1	45.000.000	2	108.745.047	1	40.000.000	-	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-		5.000.000		45.000.000		40.000.000		15.000.000		10.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	-	1	5.000.000	1	45.000.000	1	40.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				975,000,000		1,006,000,000		1,009,052,500		1,024,277,763		1,015,000,000	Sekretaris
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana yang selesai ditindaklanjuti (%)	100	100	975,000,000	100	1,006,000,000	100	1,009,052,500	100	1,024,277,763	100	1,015,000,000	Sekretaris
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000		5,500,000		5,000,000		6,655,000		5,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	1	5,000,000	1	5,500,000	1	5,000,000	1	6,655,000	1	5,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				270,000,000		290,000,000		290,000,000		300,000,000		300,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	270,000,000	12	290,000,000	12	290,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				700,000,000		710,500,000		714,052,500		717,622,763		710,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	700,000,000	12	710,500,000	12	714,052,500	12	717,622,763	12	710,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				785,247,484		998,552,216		1,065,513,538		980.148.905		885,009,931	Sekretaris
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	785,247,484	100	998,552,216	100	1,065,513,538	100	980.148.905	100	885,009,931	Sekretaris
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				330,000,000		388,079,984		395,841,584		403,758,415		411,833,584	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	21	21	330,000,000	21	388,079,984	21	395,841,584	21	403,758,415	21	411,833,584	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				427,247,484		469,972,232		474,671,955		479,418,674		430,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	20	20	427,247,484	20	469,972,232	20	474,671,955	20	479,418,674	20	430,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				3,000,000		5,500,000		5,000,000		6,655,000		7,320,500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	50	10	3,000,000	50	5,500,000	50	5,000,000	50	6,655,000	50	7,320,500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20,000,000		35,000,000		40,000,000		45,000,000		20,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN										PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharan (unit)	60	20	20,000,000	30	35,000,000	40	40,000,000	40	45,000,000	20	20,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5,000,000		100,000,000		150,000,000		45.316.815		15,855,848	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	1	5,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	45.316.815	1	15,855,848	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja B yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	
2	Persentase penanganan bencana	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan BPBD yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian BPBD	%	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Risiko Bencana	Angka	91,62-90,32	90,5-88,66	89,38-87,00	88,25-85,34	87,13-83,68	86,01-82,02	

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan kebencanaan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

Permasalahan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas penanganan bencana yang berkualitas secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

10. DINAS SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang maka Dinas Sosial wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Sosial Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang Sosial, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Sosial Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang;
27. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo pada Dinas Sosial Kota Semarang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Sosial yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penyusunan

Renstra Dinas Sosial Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang.

2.1.1. Tugas, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, tugas pokok Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi keweanagan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD.
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas.
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial.
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas.
7. Penyelenggaraan program dan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD.
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD.
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
   b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial.
5. Bidang Jaminan Sosial.
6. Bidang Perlindungan Sosial.
7. UPTD.
8. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang

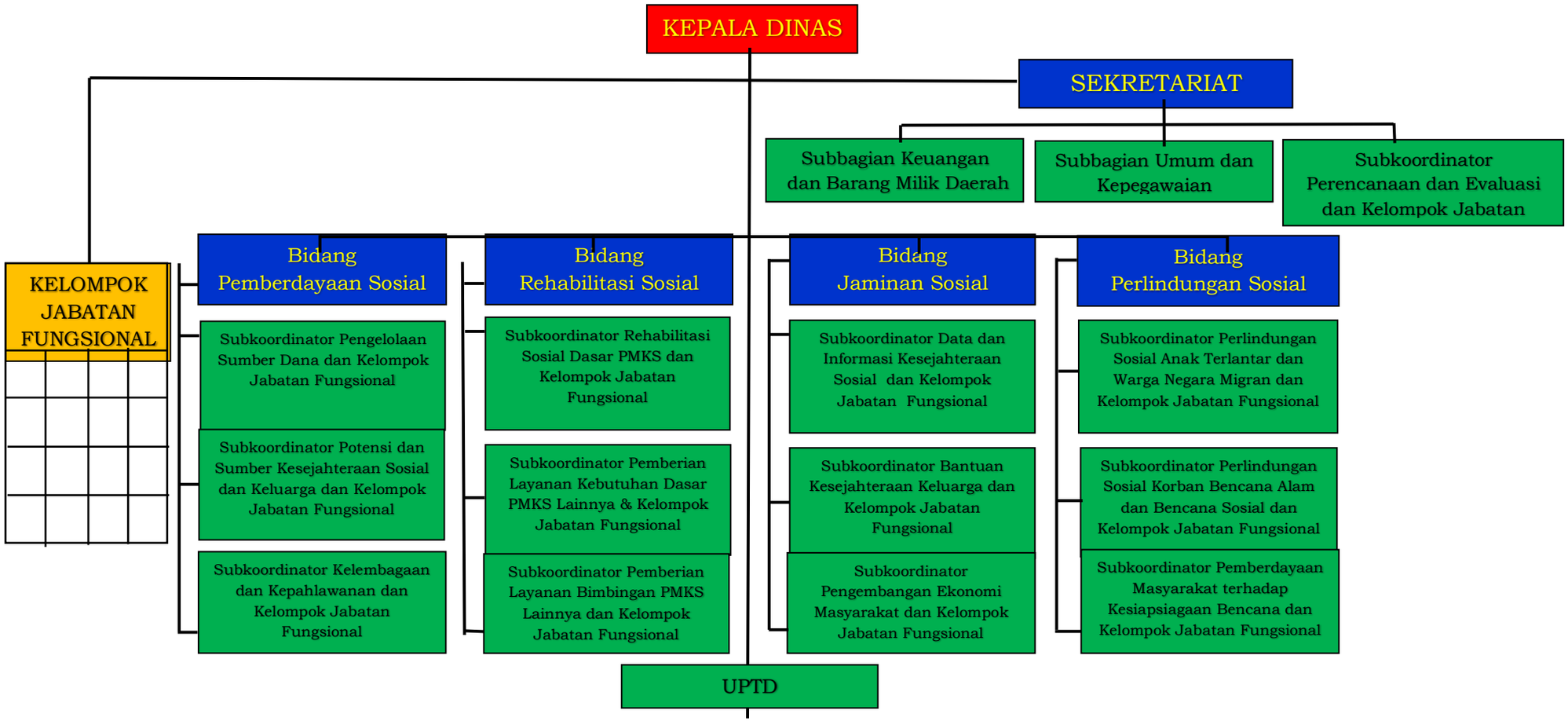

b. Uraian Tugas dan Jabaran Struktural Dinas Sosial Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, tugas pokok Dinas Sosial Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

2. Sekretaris.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, Bidang Perlindungan Sosial dan UPTD, serta diberikan tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
c. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial,dan UPTD.
d. Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial,dan UPTD.
e. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait.
f. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kesekretariatan Dinas.
g. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas.
h. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
i. Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas.
j. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas.
k. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas.
l. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas.
m. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas.
n. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan.
o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas.

p. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas.
q. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas.
r. Pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas.
s. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas.
t. Pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas.
u. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian,pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.
v. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas.
w. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas.
x. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas.
y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan.
z. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan perencanaan dan evaluasi dibentuk Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Subkoordinator tersebut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :
    1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
    2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
    3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
    4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
    5) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas.
    6) Menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas.
    7) Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas.
    8) Menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan.

9) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Dinas.
10) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :
1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5) Menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas.
6) Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas.
7) Menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas.
8) Menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas.
9) Menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas.
10) Menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas.
11) Menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.
12) Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas.
13) Menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas.
14) Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas.
15) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
16) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
17) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi, dengan tugas sebagai berikut :
   1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaandan Evaluasi.
   2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
   3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
   4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi.
   5) Menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas.
   6) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.
   7) Menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Dinas.
   8) Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas.
   9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi.
   10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuanganPerencanaan dan Evaluasi.
   11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporanpelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi.
   12) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
   13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pengelola Sumber Dana, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga, serta Kelembagaan dan Kepahlawanan dengan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial.
e. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.
f. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pengelolaan sumbangan sosial dari dunia usaha, lembaga dan perorangan.

g. Pelaksanaan pengajuan usulan pendanaan atau bantuan barang kepada perusahaan.
h. Pelaksanaan kegiatan penyiapan daftar perusahaan potensial penyediaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
i. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan daerah.
j. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan daerah.
k. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan daerah.
l. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengelolaan data PSKS.
m. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi PSKS dan penyuluh sosial.
n. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyusunan dokumen pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
o. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat kewenangan daerah.
p. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
q. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi relawan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
r. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi lanjut usia potensial di luar panti.
s. Pelaksanaan kegiatan kepahlawanan, ziarah dan upacara peringatan kesetiakawanan sosial.
t. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan kewenangan daerah.
u. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi usulan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan.
v. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi usulan Satyalancana Kebaktian Sosial.
w. Pelaksanaan kegiatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.
x. Pelaksanaan kegiatan Restorasi Sosial.
y. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Sosial.
z. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Sosial.
aa. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial.
bb. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :

a. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Dana.
b. Subkoordinator Potensi dan Suber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga.
c. Subkoordinator Kelembagaan dan Kepahlawanan.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Subkoordinator tersebut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

a. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Dana mempunyai tugas sebagai berikut :
    1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan Sumber Dana.

2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Dana.
5) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.
6) Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengelolaan sumbangan sosial dari dunia usaha, lembaga dan perorangan.
7) Menyiapkan pengajuan usulan pendanaan atau bantuan barang kepada perusahaan.
8) Menyiapkan daftar perusahaan potensial penyediaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengelolaan Sumber Dana.
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Pengelolaan Sumber Dana.
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Dana.
12) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga.
5) Menyiapkan kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan daerah.
6) Menyiapkan kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan daerah.
7) Menyiapkan kegiatan peningkatan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan daerah.
8) Menyiapkan kegiatan pendataan dan pengelolaan data PSKS.
9) Menyiapkan kegiatan sertifikasi PSKS dan penyuluh sosial.
10) Menyiapkan kegiatan pendataan dan penyusunan dokumen pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga.
12) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga.
13) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Potensi dan

Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga.

14) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Kelembagaan dan Kepahlawanan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kelembagaan dan Kepahlawanan.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kelembagaan dan Kepahlawanan.
5) Menyiapkan kegiatan peningkatan kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat kewenangan daerah.
6) Menyiapkan kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
7) Menyiapkan kegiatan peningkatan kompetensi relawan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
8) Menyiapkan kegiatan fasilitasi lanjut usia potensial di luar panti.
9) Menyiapkan kegiatan kepahlawanan, ziarah dan upacara peringatan kesetiakawanan sosial.
10) Menyiapkan kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan kewenangan daerah.
11) Menyiapkan kegiatan fasilitasi usulan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan.
12) Menyiapkan kegiatan fasilitasi usulan Satyalancana Kebaktian Sosial.
13) Menyiapkan kegiatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.
14) Menyiapkan kegiatan Restorasi Sosial.
15) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Kelembagaan dan Kepahlawanan.
16) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Kelembagaan dan Kepahlawanan.
17) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kepahlawanan.
18) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Terlantar, Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya, dan Pemberian Layanan Bimbingan PMKS

Lainnya dengan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
e. Pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
f. Pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
h. Pelaksanaan kegiatan pemberian layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
i. Pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan penelusuran keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
j. Pelaksanaan kegiatan pemberian layanan rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
k. Pelaksanaan kegiatan penindaklanjutan pemberian layanan bagi warga terlantar hasil rujukan.
l. Pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan perihal penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
m. Pelaksanaan kegiatan pelayanan razia pelanggaran Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
n. Pelaksanaan kegiatan pemberian layanan data dan pengaduan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
o. Pelaksanaan kegiatan pemberian layanan kedaruratan bagi PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
p. Pelaksanaan kegiatan penyediaan permakanan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
q. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sandang bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
r. Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat bantu bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
s. Pelaksanaan kegiatan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
t. Pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan penanganan kebutuhan dasar kepada Anak Jalanan, Pemulung, Anak dengan

kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP) dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis di Luar Panti Sosial.

u. Pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
v. Pelaksanaan kegiatan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
w. Pelaksanaan kegiatan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
x. Pelaksanaan kegiatan pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
y. Pelaksanaan kegiatan pemberian layanan rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
z. Pelaksanaan kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
aa. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
bb. Pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan penanganan pemberian bimbingan kepada Anak Jalanan, Pemulung, Anak dengan kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP) dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis di Luar Panti Sosial.
cc. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Rehabilitasi Sosial.
dd. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
ee. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
ff. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas :

a. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Terlantar.
b. Subkoordinator Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya.
c. Subkoordinator Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Subkoordinator tersebut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

a. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Terlantar mempunyai tugas sebagai berikut :
    1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Terlantar.
    2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
    3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
    4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Terlantar.

5) Menyiapkan kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
6) Menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.
7) Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
8) Menyiapkan kegiatan pemberian layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
9) Menyiapkan kegiatan pemberian pelayanan penelusuran keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
10) Menyiapkan kegiatan pemberian layanan rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
11) Menyiapkan kegiatan penindaklanjutan pemberian layanan bagi warga terlantar hasil rujukan.
12) Menyiapkan kegiatan pendataan bulanan perihal penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
13) Menyiapkan kegiatan pelayanan razia pelanggaran Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
14) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Terlantar.
15) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Terlantar.
16) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Terlantar.
17) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya.

5) Menyiapkan kegiatan pemberian layanan data dan pengaduan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
6) Menyiapkan kegiatan pemberian layanan kedaruratan bagi PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
7) Menyiapkan kegiatan penyediaan permakanan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
8) Menyiapkan kegiatan penyediaan sandang bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
9) Menyiapkan kegiatan penyediaan alat bantu bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
10) Menyiapkan kegiatan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
11) Menyiapkan kegiatan pendataan bulanan penanganan kebutuhan dasar kepada Anak Jalanan, Pemulung, Anak dengan kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP) dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis di Luar Panti Sosial.
12) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya;
13) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya.
14) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya.
15) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya.
5) Menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
6) Menyiapkan kegiatan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
7) Menyiapkan kegiatan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar

panti sosial.

8) Menyiapkan kegiatan pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
9) Menyiapkan kegiatan pemberian layanan rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
10) Menyiapkan kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
11) Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
12) Menyiapkan kegiatan pendataan bulanan penanganan pemberian bimbingan kepada Anak Jalanan, Pemulung, Anak dengan kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP) dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis di Luar Panti Sosial.
13) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya.
14) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan.
15) Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya.
16) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya.
17) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasdan fungsinya.

5. Kepala Bidang Jaminan Sosial.

Bidang Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Jaminan Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Bantuan Kesejahteraan Keluarga, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Jaminan Sosial.
e. Pelaksanaan kegiatan pendataan fakir miskin cakupan daerah.
f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
g. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan data bantuan pengentasan

kemiskinan terpusat.

h. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pengentasan bantuan kemiskinan otonom.
i. Pelaksanaan kegiatan pendataan, pengelolaan, verifikasi dan validasi data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis di luar panti sosial.
j. Pelaksanaan kegiatan pendataan, pengelolaan, verifikasi dan validasi data PMKS.
k. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang terdiri dari Kegiatan Santunan Kematian, Kegiatan Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Fasilitasi penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
l. Pelaksanaan kegiatan fasillitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Pengentasan Kemiskinan Terpusat.
m. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi jaminan sosial anak yang baru lahir dari keluarga miskin.
n. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerima *Universal Health Coverage* (UHC).
o. Pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan penanganan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.
p. Pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan penanganan kesejahteraan keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin dan Keluarga Berumah Tidak Layak Huni.
q. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
r. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Jaminan Sosial.
s. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Jaminan Sosial.
t. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Jaminan Sosial.
u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Jaminan Sosial terdiri atas :

a. Subkoordinator Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
b. Subkoordinator Bantuan Kesejahteraan Keluarga.
c. Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Jaminan Sosial, Subkoordinator tersebut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

a. Subkoordinator Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
    1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
    2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
    3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
    4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
    5) Menyiapkan kegiatan pendataan fakir miskin cakupan

daerah.

6) Menyiapkan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
7) Menyiapkan kegiatan Pengelolaan data bantuan pengentasan kemiskinan terpusat.
8) Menyiapkan kegiatan Pengelolaan data pengentasan bantuan kemiskinan otonom.
9) Menyiapkan kegiatan pendataan, pengelolaan, verifikasi dan validasi data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.
10) Menyiapkan kegiatan pendataan, pengelolaan, verifikasi dan validasi data PMKS.
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
12) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
13) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
14) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Bantuan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bantuan Kesejahteraan Keluarga.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Bantuan Kesejahteraan Keluarga.
5) Menyiapkan kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang terdiri dari Kegiatan Santunan Kematian, Kegiatan Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Fasilitasi penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6) Menyiapkan kegiatan fasillitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Pengentasan Kemiskinan Terpusat.
7) Menyiapkan kegiatan fasilitasi jaminan sosial anak yang baru lahir dari keluarga miskin.
8) Menyiapkan kegiatan fasilitasi penerima *Universal Health Coverage* (UHC).
9) Menyiapkan kegiatan pendataan bulanan penanganan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.
10) Menyiapkan kegiatan pendataan bulanan penanganan kesejahteraan keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin dan Keluarga Berumah Tidak Layak Huni.
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga.
12) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban

teknis keuanganBantuan Kesejahteraan Keluarga.

13) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Kesejahteraan Keluarga.
14) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Pengembangan Eknomi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
   1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
   2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
   3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
   4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
   5) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
   6) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
   7) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
   8) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
   9) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
   10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, serta Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana dengan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Perlindungan Sosial.
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Sosial.
e. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untukdipulangkan ke desa/kelurahan asal.
f. Pelaksanaan kegiatan pendataan pekerja migran.

g. Pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak kekerasan bagi calon warga negaramigran.
h. Pelaksanaan kegiatan penjangkauan anak-anak terlantar.
i. Pelaksanaan kegiatan rujukan anak-anak terlantar.
j. Pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.
k. Pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban trafficking dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
l. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Warga Negara Migran Bermasalah Sosial.
m. Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan.
n. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sandang.
o. Pelaksanaan kegiatan penyediaan tempat penampungan Pengungsi.
p. Pelaksanaan kegiatan penanganan khusus bagi kelompok rentan.
q. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dukungan psikososial.
r. Pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan korban bencana alam dan korban bencana sosial bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
s. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana.
t. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.
u. Pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan Pemuda Pelopor, kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana.
v. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pemberian bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial yang bersumber dari dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
w. Pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan pemberian bantuan yang bersumber dari dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial.
x. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perlindungan Sosial.
y. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perlindungan Sosial.
z. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Sosial.
aa. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Sosial terdiri atas :

a. Subkoordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran.
b. Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
c. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Subkoordinator tersebut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

a. Subkoordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran mempunyai tugas sebagai berikut :
   1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran.
   2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
   3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
   4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran.
   5) Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
   6) Menyiapkan kegiatan pendataan pekerja migran.
   7) Menyiapkan kegiatan pencegahan tindak kekerasan bagi calon warga negaramigran.
   8) Menyiapkan kegiatan penjangkauan anak-anak terlantar.
   9) Menyiapkan kegiatan rujukan anak-anak terlantar.
   10) Menyiapkan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.
   11) Menyiapkan kegiatan pendataan bulanan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban trafficking dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
   12) Menyiapkan kegiatan rehabilitasi Warga Negara Migran Bermasalah Sosial
   13) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran.
   14) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran.
   15) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran.
   16) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
   17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
   1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
   2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
   3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
   4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perlindungan Sosial KorbanBencana Alam dan Bencana Sosial.
   5) Menyiapkan kegiatan penyediaan makanan.
   6) Menyiapkan kegiatan penyediaan sandang.
   7) Menyiapkan kegiatan penyediaan tempat penampungan pengungsi.

8) Menyiapkan kegiatan penanganan khusus bagi kelompok rentan.
9) Menyiapkan kegiatan pelayanan dukungan psikososial.
10) Menyiapkan kegiatan pendataan bulanan korban bencana alam dan korban bencana sosial bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
12) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
13) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
14) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.
5) Menyiapkan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana.
6) Menyiapkan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.
7) Menyiapkan kegiatan pendataan bulanan Pemuda Pelopor, kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana.
8) Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pemberian bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial yang bersumber dari dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9) Menyiapkan kegiatan pendataan bulanan pemberian bantuan yang bersumber dari dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial.
10) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.
11) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.
12) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.
13) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan.

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Among Jiwo.

UPTD Among Jiwo merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dengan tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo sampai mendapatkan rujukan ke panti/reunifikasi keluarga oleh dinas, serta diberi tugas tambahan selau koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Among Jiwo mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran.
b. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
d. Pelaksanaan penyediaan permakanan, sandang dan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis didalam UPTD Among Jiwo.
e. Pelaksanaan bimibingan fisik, mental, spriritual dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis didalam UPTD Among Jiwo.
f. Pelaksanaan pemberian pelayanan kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis didalam UPTD Among Jiwo.
g. Pelaksanaan pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis didalam UPTD Among Jiwo.
h. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Among Jiwo.
i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Among Jiwo.
j. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di UPTD Among Jiwo.
k. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan/sub kegiatan.
l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
m. Pelaksanaan pemeliharaan prasaran dan sarana UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial.
o. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
p. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
q. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
s. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan.
t. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kota Semarang.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia.

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan formal. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2025 (Bulan September)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA Sederajat	6	2	5	1	14
2	D2	1	-	-	-	1
3	D3	1	4	2	3	10
4	S1	20	40	2	6	68
5	S2	2	5	-	1	8
6	S3	1	-	-	-	1

Dari jumlah pegawai sebanyak 102 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025 (Bulan September)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
	PNS			
1	Golongan II	3	2	5
2	Golongan III	9	21	30
3	Golongan IV	3	4	7
	PPPK			
1	Gol V	6	3	9
2	Gol VII	1	3	4
3	Gol IX	9	18	27

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Sosial Kota Semarang

No	Nama Barang/Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak /Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Kampung	150	2010	JL Karang Wulan Sari No 11 Kelurahan Brumbungan Semarang Tengah	Hak Pakai	30/04/2007	HP 46	Gedung Graha Sosial	Pembelian	158.500.000	Gedung Graha Sosial

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Kota Semarang

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	225	Jl. KRT. Wongsonegoro Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	313.100.000
2	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Kurang Baik	155	Jl. KRT. Wongsonegoro Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	71.400.000
3	Asrama Permanen	Baik	200	Jl. KRT. Wongsonegoro Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	56.800.000
4	Asrama Lain-lain (dst)	Baik	200	Jl. KRT. Wongsonegoro Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	35.700.000
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.218.984.800
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen(Dapur Among Jiwo)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	137.332.764
7	Bangunan Klinik/Puskesmas(Poliklinik dan Mushola)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	222.169.393

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	180	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	25.005.837
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (rumah pagar 1)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.107.560
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (rumah pagar 2)	Baik	200	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.107.560
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (rumah pagar 3)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.107.560
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (rumah pagar 5)	Kurang Baik	180	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.107.560
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (rumah pagar 6)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.107.560
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (rumah pagar 7)	Baik	200	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.107.560
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (rumah pagar 8)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.107.560
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (rumah pagar 9)	Kurang Baik	180	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.107.560
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (rumah pagar 4)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.107.560
18	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	155	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	92.181.214
19	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	155	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	120.420.546

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Kurang Baik	180	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	120.420.545
21	Pagar Permanen (Gapura Among Jiwo)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	31.794.660
22	Pagar Permanen(Pagar depan selatan)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	36.832.659
23	Pagar Permanen(Pagar depan utara)	Baik	150	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	26.272.660
24	Pagar Permanen(Pagar samping selatan)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	26.716.366
25	Pagar Permanen(pagar samping utara)	Baik	200	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	26.716.366
26	Pagar Permanen(pagar samping belakang)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	26.716.368
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen(Tempat pemandian jenazah)	Baik	100	Jalan Beringin Putih No 1 RT 4 RW 9 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	198.350.000
28	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	262,088	JL Karang Wulan Sari No 11 Kelurahan Brumbungan Semarang Tengah		Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.838.000
29	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	608	Jl Durian Raya No 29 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.288.151.693
30	Bangunan Rumah Sakit Khusus	Baik	609	Jl Durian Raya No 29 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.140.339.285
31	Bangunan Rumah Sakit Khusus	Baik	36	Jl Durian Raya No 29 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	806.466.680

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	78	Jl Durian Raya No 29 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	80.330.022
33	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	560	Jl Durian Raya No 29 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	240.388.128
34	Pagar Permanen	Baik	270	Jl Durian Raya No 29 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	346.615.160
35	Bangunan Kolam/Bak Ikan(Kolam Terapi)	Baik	18	Jl Durian Raya No 29 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	189.156.829
36	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Among Jiwo II)	Baik	2019	Jl. Damar Raya Beringin		Tanah Milik Pemda	Hibah	5.608.459.800

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang mamberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator Dinas Sosial Kota Semarang ditunjukkan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan Dinas Sosial di Kota Semarang.

Prestasi Dinas sosial Kota Semarang lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (out come/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (Out put/keluaran).

Pada tahun 2025 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang, Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kota berupa capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebanyak 343 orang.
2. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sebanyak 16.736 orang.
3. Melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Kesehatan dalam memberikan layanan sosial dan penjangkauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Semarang. Dimana yang terjaring penjangkauan diberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial di UPTD Among Jiwo.
4. Pemberian bantuan permakanan kepada warga Kota Semarang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 15.522 orang.
5. Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai-nilai sejarah setiap tahun berupa peringatan hari-hari bersejarah yaitu Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lahir Pancasila, Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Hari Pahlawan di setiap tahunnya.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di Kota Semarang sebanyak 1.408 orang.
7. Melaksanakan fasilitasi penjangkauan berupa pendampingan kepada penderita atau eks penderita dan atau keluarga psikotik yang dilaksanakan atas kerjasama dengan TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Dinas Kesehatan serta Puskesmas.
8. Pembinaan dan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) bersama tim terpadu penanggulangan bencana dan fasilitasi kegiatan/simulasi pengamanan diri terhadap resiko bencana alam

dan kebakaran dengan sasaran kegiatan sekolah/pelajar sebanyak 58 orang.

9. Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) bersama tim terpadu penanggulangan bencana sosial dan fasilitasi kegiatan terhadap resiko bencana sosial dengan sasaran kegiatan kelompok masyarakat di wilayah yang beresiko tinggi terjadi gesekan antar kelompok masyarakat di kota Semarang sebanyak 22 orang.
10. Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber dan Potensi Kesejateraan lainnya dalam rangka ikut serta dalam penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat sebanyak 276 orang.
11. Pemberian bantuan alat bantu bagi warga disabilitas yang membutuhkan sesuai surat permohonan dan atau mendapat rekomendasi dari kelurahan dan puskesmas sebanyak 36 orang.

a. Capaian Kinerja Dinas Dinas Sosial Kota Semarang.

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan sosial yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-							Realisasi Capaian pada Tahun ke-							Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2020	2021	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	2020	2021	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	2020	2021	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10			11	12	13	14	15			16	17	18	19	20
	Indikator Tujuan dan Sasaran																								
1	Persentase Penduduk Miskin	%			N/A	N/A	16,10	15,80	15,50	15,20	14,90	N/A	N/A	11,06	9,68	9,38	N/A	N/A	N/A	N/A	68,70	61,27	60,52	N/A	N/A
2	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	%			N/A	N/A	0,05	0,3	0,3	0,3	0,3	N/A	N/A	N/A	0,3	0,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Indikator kinerja kunci / Indikator SPM																								
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	100	100	N/A	N/A
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	100	100	N/A	N/A
	Indikator lainnya																								
5	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)	%			N/A	N/A	16,10	15,80	15,50	15,20	14,90	N/A	N/A	11,06	9,68	9,38	N/A	N/A	N/A	N/A	68,70	61,27	60,52	N/A	N/A
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%			N/A	N/A	99, 75	99,81	99,87	99,93	99,99	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100,25	100,19	100,13	N/A	N/A
7	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	%			N/A	N/A	66,67	78	89	100	100	N/A	N/A	83,33	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	124,99	128,21	112,36	N/A	N/A
8	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	%			N/A	N/A	69,15	69,85	70,54	71,25	71,96	N/A	N/A	80,34	97,5	100	N/A	N/A	N/A	N/A	116,18	139,58	141,76	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-							Realisasi Capaian pada Tahun ke-							Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2020	2021	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	2020	2021	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	2020	2021	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)
9	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	%			N/A	N/A	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kota Semarang.

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Sosial Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Sosial Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kota Semarang

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	ANG-GARAN	REALI-SASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.827.390.153	10.737.798.025	10.175.654.209	N/A	N/A	9.446.751.328	10.450.397.565	9.979.389.434	N/A	N/A	96,13%	97,32%	98,07%	N/A	N/A	3,54%	5,64%
Program Pemberdayaan Sosial	7.653.900.777	7.651.690.831	7.018.146.301	N/A	N/A	7.240.150.944	7.284.645.019	6.649.854.208	N/A	N/A	94,59%	95,20%	94,75%	N/A	N/A	-8,31%	-8,15%
Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	17.701.968	45.413.532	35.216.132	N/A	N/A	13.387.399	30.659.070	18.308.000	N/A	N/A	75,63%	67,51%	51,99%	N/A	N/A	98,94%	36,76%
Program Rehabilitasi Sosial	12.642.555.412	9.447.861.272	8.727.043.480	N/A	N/A	12.367.689.026	8.222.571.255	8.082.396.561	N/A	N/A	97,83%	87,03%	92,61%	N/A	N/A	-30,97%	-34,65%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.274.938.128	6.357.803.540	5.297.511.910	N/A	N/A	3.922.163.107	4.410.933.488	4.571.534.651	N/A	N/A	74,35%	69,38%	86,30%	N/A	N/A	0,43%	16,56%
Program Penanganan Bencana	907.882.758	1.031.686.086	1.247.999.520	N/A	N/A	848.852.600	986.748.405	1.044.628.152	N/A	N/A	93,50%	95,64%	83,70%	N/A	N/A	37,46%	23,06%

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan.

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang Sebagai Berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia profesional yang menangani masalah sosial.
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dinas sosial dalam penanganan masalah sosial.
3. Kurang Validnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial/shelter/rumah singgah yang ada masih kurang memadai (over load).
5. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial/shelter/rumah singgah dan rumah autis milik dinas sosial.

b. Peluang.

Sedangkan peluang bagi Dinas Sosial Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Letak Kota Semarang yang strategis.
2. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat.
5. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Dinas Sosial Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Sosial Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Sosial Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Semarang yaitu: “Masih Banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya" yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
"Masih Banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3
1	Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada	Faktor ekonomi masyarakat Kota Semarang dan letak geografis Kota Semarang
2	Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial	Semakin banyaknya jumlah PPKS yang harus dilayani dari hasil aduan masyarakat dan razia yang dilaksanakan bersama OPD terkait yang rata rata berasal dari luar kota Semarang
3	Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/shelter dan rumah autis yang dimiliki dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum tersedianya sarana prasarana operasional yang memadai untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Semarang
4	Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial	Belum tersedianya aplikasi pendukung dalam mengolah dan mengelola data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Semarang

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Sosial Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi masyarakat Kota Semarang dan letak geografis Kota Semarang.
2. Semakin banyaknya jumlah PPKS yang harus dilayani dari hasil aduan masyarakat dan razia yang dilaksanakan bersama OPD terkait yang rata rata berasal dari luar kota Semarang.
3. Belum tersedianya sarana prasarana operasional yang memadai untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Semarang.
4. Belum tersedianya aplikasi pendukung dalam mengolah dan mengelola data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Semarang.

2.2.2 Telaahan Dokumen lainnya.

a. Telaahan RPJMN 2025-2029.

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang sesuai dengan lingkung perangkat Daerah.

b. Telaahan Visi, Misi Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan

gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif"

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Sosial, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: "Menurunnya kemiskinan secara inklusif"

Dinas Sosial secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dalam mencapai indikator "Angka Kemiskinan".

c. Telaahan Renstra Kementarian Sosial.

Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2025 mencakup fokus pada penanganan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas data dan teknologi untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Kemensos juga akan terus meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program-program seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan

Dalam arah kebijakan dan sasaran strategis periode 2025-2029, Kemensos meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan melalui perlindungan sosial yang adaptif.

d. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Sosial adalah menurukan tingkat kemiskinan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Penurunan Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu pada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan 4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

e. Telaaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Sosial. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Sosial dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Sosial dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kota Semarang berdasarkan Perturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 untuk kawasan Semarang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Sosial Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Sosial tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Sosial Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Dinas Sosial dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Sosial adalah terkait kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender.

Tabel.2.8
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah.
Dinas Sosial Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	1. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
	2. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender

Tabel 2.9
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029
Dinas Sosial

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.(c)	Persentase Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	8,36	10,12	11,87	13,62	15,37	17,12	Meningkatkan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat miskin

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

g. Telaahan Dokumen lainnya.

1) Isu Strategis Daerah.

Penetapan isu-isu strategis Kota Semarang pada pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia.
b) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas.
c) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.
d) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas.
e) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat.
f) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota.
g) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari isu strategis Daerah diatas yang sangat mempengaruhi pada pelayanan urusan sosial yaitu “Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas” dan “Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat”.

2) Isu Strategis Daerah berkaitan dengan urusan sosial.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu-isu global, nasional, Kementerian terkait, KLHS, daerah provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang terdapat problematika dan dinamika permasalahan kesejahteraan sosial demikian kompleks. Dimensi kultural dan struktural merupakan menjadi hal penting untuk dibedah lebih lanjut. Berbagai persoalan, tantangan dan peluang yang ada selanjutnya diakumulasikan menjadi isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang yang menjadi fokus dan dasar dalam menyusun program dan kegiatan intervensi kesejahteraann sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Masih banyaknya Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan pelayanan sosial.
b) Masih kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam keterlibatan penangananan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
c) Kompetensi dan motivasi kerja SDM Dinas.
d) Isu Gender yang menjadi isu global.
e) Masih adanya anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.
f) Validitas penduduk miskin yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial yang akurat.

g) Pemberian makanan tambahan bagi keluarga miskin rawan stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan Baduta.
h) Pembinaan, konseling dan pembinaan bagi penyandang disabilitas.
i) Pusat Layanan yang lebih komprehensif dan inklusif di masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial untuk lansia, disabilitas dan kaum duafa.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Kota Semarang.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Sosial, Renstra, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.10
Isu Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah	1. Banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki 3. Masih terbatasnya sarana prasarana 4. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5. Kompetensi dan motivasi kerja Sumber Daya Manusia Dinas Sosial 6. Kompetensi PSKS yang ada	1. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat 2. Kesetaraan gender	Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia	1. Masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah 2. Penanganan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas data dan teknologi untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran	1. Cakupan rendahnya akses terhadap layanan dasar sosial 2. Cakupan ketimpangan kesejahteraan 3. Kemiskinan	1. Masih banyaknya Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan pelayanan sosial 2. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam keterlibatan penangananan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 3. Kompetensi dan motivasi kerja SDM Dinas 4. Isu Gender yang menjadi isu global

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Sosial sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Sosial sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Sosial. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Sosial. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat"

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

   Dengan indikator sasaran "Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)". Indikator ini diukur dari persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial.
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Sosial.

   Dengan indikator sasaran :
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial. Indikator ini diukur dari hasil penilaian terhadap AKIP (Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja.
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial.
      Indikator ini diukur dari hasil survey masyarakat melalui aplikasi ASIKMAS Kota Semarang.

Tabel 3.1.
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	3	4								
Menurunnya kemiskinan secara inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Cakupan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial	Angka	80,05	80,5	81	81,5	82	82,5	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial.	Angka	92	92,5	93	93,5	94	94,5	

Strategi dan kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Sosial mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan landasan layanan bagi PPKS dalam mendukung Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Mendorong layanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan kesejahteraan sosial PPKS melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pusat layanan bagi PPKS didukung SDM yang professional, tata kelola efektif dan efisien serta sarpras yang memadai dan ramah disabilitas	Perwujudan kesejahteraan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.2.2. Kebijakan.

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Sosial Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Semarang.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya kemiskinan secara inklusif	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender	Peningkatan pemberian layanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti untuk mendapatkan rehabilitasi sosial.	
			Peningkatan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial di daerah kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	
			Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada.	
			Melaksanakan Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) minimal 1 tahun sekali.	
			Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, meningkatkan kualitas kinerja administrasi dan pelaporan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan kompetensi SDM	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Sosial Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PD

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat				Cakupan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))		
			Meningkatnya kapasitas PSKS dalam mengatasi permasalahan sosial		Indeks Efektivitas Penguatan Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
				Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana
				Meningkatnya kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.	Persentase kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja (Penyuluh Sosial Pertama)

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Staf Ketua Tim Kerja (Penyuluh Sosial Pertama)
						Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Staf Ketua Tim Kerja (Penyuluh Sosial Pertama)
						Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Staf Ketua Tim Kerja (Penyuluh Sosial Pertama)
						Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Staf Ketua Tim Kerja (Penyuluh Sosial Pertama)
				Meningkatnya kemampuan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kewenangan Kab/kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kab/kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga
						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga
						Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga
						Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase PPKS Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kepala Bidang Perlindungan Sosial
				Meningkatnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan Ke Daerah Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran
						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran
			Meningkatnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS		Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kepala UPTD Among Jiwo

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		
						Penyediaan Permakanan	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Penyediaan Sandang	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Penyediaan Alat Bantu	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Pemberian Layanan Kedaruratan	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Pemberian Layanan Rujukan	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Staff Kepala UPTD Among Jiwo
				Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui	Persentase Pemberdayaan Ekonomi Bagi	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama KemitraanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan	Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya
						Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya
				Meningkatnya Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya
						Penyediaan Permakanan	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya
						Penyediaan Sandang	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya
						Penyediaan Alat Bantu	Staff Pekerja Sosial Muda Sub

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
							Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya
				Meningkatnya Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemberian Layanan Kedaruratan	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Pemberian Layanan Rujukan	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
			Menurunnya kerentanan anak terlantar melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran		Persentase Anak Terlantar yang mendapat perlindungan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Perlindungan Sosial
				Meningkatnya Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Persentase Anak - Anak Terlantar yang mendapatkan Perlindungan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran
						Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran
						Rujukan Anak-Anak Terlantar	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
							Warga Negara Migran
						Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran
						Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran
			Menurunnya kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran		Persentase Warga Miskin yang mendapat jaminan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Jaminan Sosial
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari kemiskinan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Persentase Warga Miskin dan Pekerja Rentan Miskin yang menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
						Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
				Meningkatnya Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha bagi Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatakan Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Bantuan Kesejahteraan Keluarga
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Bantuan Kesejahteraan Keluarga
						Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Bantuan Kesejahteraan Keluarga
			Meningkatnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pasca bencana		Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	Program Penanganan Bencana	Kepala Bidang Perlindungan Sosial

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Penyediaan Makanan	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Penyediaan Sandang	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
						Pelayanan Dukungan Psikososial	Staff Ka. Tim Kerja (Pekerja Sosial Pertama)
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana
						Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana
						Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana
						Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana
						Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana
						Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Staff Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Sosial			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Sosial		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Dinas Sosial
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial		
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staff Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Staff Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Staff Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Staff Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Staff Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Staff Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staff Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung statistik sektoral daerah	Staff Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staff Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
						Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staff Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Staff Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staff Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Staff Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
						Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staff Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Sosial	Persentase layanan kepegawaian Dinas Sosial	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial	Administrasi Umum perangkat daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Fasilitasi kunjungan tamu	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyelenggaraan Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Pengadaan Mebel	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Sosial yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras Dinas Sosial sesuai ketentuan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Pemeliharaan Mebel	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
						Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staff Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Perangkat Daerah Dinas Sosial Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu :

1. Penyedian Ruang dengan Konsep Harmonisasi antara Fungsi Ekologi, Sosial, Edukasi dan Rekreasi di 16 Kecamatan secara gratis (dokumen dan brosur).
2. Pemberian makanan tambahan bagi keluarga miskin rawan stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan Baduta guna menciptakan generasi SDM mendatang yang berdaya guna (dokumen)
3. Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo dan rumah singgah.
4. Peningkatan kesejahteraan seniman Kota Semaran melalui bantuan ekonomi.
5. Penguatan perlindngan perempuan, anak, disabilitas dan lansia.

Bentuk dukungan dalam mencapai program prioritas kepala daerah diatas tetera dala tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Menurunnya kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang pada lampiran sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat				36,171,381,389		40,105,640,189		41,818,012,747		42,132,551,254		42,874,482,451	
1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial					6,694,457,818		7,402,702,167		7,710,963,074		7,767,586,222		7,901,148,503	
Meningkatnya kapasitas PSKS dalam mengatasi permasalahan sosial	Indeks Efektivitas Penguatan Pemberdayaan Sosial	Persentase	100	100	6,694,457,818	100	7,402,702,167	100	7,710,963,074	100	7,767,586,222	100	7,901,148,503	
1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					115,991,280		130,000,000		145,000,000		150,000,000		155,000,000	
Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	115,991,280	100	130,000,000	100	145,000,000	100	150,000,000	100	155,000,000	
1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	5	5	115,991,280	5	130,000,000	5	145,000,000	5	150,000,000	5	155,000,000	
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					6,578,466,538		7,272,702,167		7,565,963,074		7,617,586,222		7,746,148,503	
Meningkatnya kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.	Persentase kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.	Persentase	100	100	970,566,920	100	1,075,000,000	100	1,181,000,000	100	1,187,000,000	100	1,200,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	15	150,000,000	15	155,000,000	15	164,000,000	15	165,000,000	15	165,000,000	
1.06.02.2.03.0010 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan														
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	0	2	30,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	2	45,000,000	2	50,000,000	
1.06.02.2.03.0011 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial														
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman,danPenghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	0	4500	701,010,000	4500	758,000,000	4500	850,000,000	4500	850,000,000	4500	858,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.02.2.03.0017 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	orang		10	89,556,920	10	127,000,000	10	127,000,000	10	127,000,000	10	127,000,000	
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					6,578,466,538		7,272,702,167		7,565,963,074		7,617,586,222		7,746,148,503	
Meningkatnya kemampuan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kewenangan Kab/kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kab/kota				5,607,899,618		6,197,702,167		6,384,963,074		6,430,586,222		6,546,148,503	
1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	4	4	70,746,381	4	90,000,000	4	99,000,000	4	105,000,000	4	110,000,000	
1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota penanganan kasus	Orang	12	30	20,000,000	30	25,000,000	30	30,000,000	30	35,000,000	30	40,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kewenangan Kabupaten/Kota													
1.06.02.2.03.0013 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota														
Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Lembaga		50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	
1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atauTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		8	5,457,153,237	20	6,022,702,167	25	6,195,963,074	30	6,230,586,222	35	6,336,148,503	
1.06.02.2.03.0016 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial														
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan		13	10,000,000	13	10,000,000	13	10,000,000	13	10,000,000	13	10,000,000	
1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					30,451,149		33,672,747		35,074,937		35,332,499		35,940,035	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase PPKS Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	100	100	30,451,149	100	33,672,747	100	35,074,937	100	35,332,499	100	35,940,035	
1.06.03. 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran KorbanTindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					30,451,149		33,672,747		35,074,937		35,332,499	100	35,940,035	
Meningkatnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan Ke Daerah Asal	Persentase	100	100	30,451,149		33,672,747		35,074,937		35,332,499		35,940,035	
1.06.03.2.02.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dariTitik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	3	30,451,149	3	33,672,747	4	35,074,937	4	35,332,499	5	35,940,035	
1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial					8,672,516,999		9,590,031,355		9,989,376,310		10,062,730,304		10,235,757,184	
Meningkatkan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	8,672,516,999	100	9,590,031,355	100	9,989,376,310	100	10,062,730,304	100	10,235,757,184	
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					2,472,617,390		2,739,031,355		3,004,376,310		3,025,730,304		3,122,757,184	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase	100	100	2,472,617,390	100	2,739,031,355	100	3,004,376,310	100	3,025,730,304	100	3,122,757,184	
1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan														
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	343	182	1,387,130,910	182	1,500,000,000	182	1,619,876,310	182	1,625,000,000	182	1,636,757,184	
1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang														
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaiandan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	310	182	58,569,800	182	64,500,000	182	70,000,000	182	71,230,304	182	80,000,000	
1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7	2	418,130	2	750,000	2	1,000,000	2	1,500,000	2	2,000,000	
1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	64	40	33,950,000	40	37,400,000	40	45,000,000	40	47,000,000	40	50,000,000	
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	343	157	627,792,220	157	691,381,355	157	750,000,000	157	750,000,000	157	790,000,000	
1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewengangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	25	28,773,000	25	50,000,000	25	75,000,000	25	77,000,000	25	80,000,000	
1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	310	161	6,222,330	161	17,000,000	161	25,000,000	161	26,000,000	161	28,000,000	
1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	343	229	94,000,000	229	103,000,000	229	112,000,000	229	113,000,000	229	120,000,000	
1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan														
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	223	81	163,225,000	81	180,000,000	81	190,000,000	81	192,000,000	81	197,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kewenangan Kabupaten/Kota	Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota													
1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	122	86	29,925,000	86	40,000,000	86	50,000,000	86	52,000,000	86	57,000,000	
1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan														
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	44	21	29,925,000	21	40,000,000	21	50,000,000	21	52,000,000	21	57,000,000	
1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	20	6,686,000	20	8,000,000	20	8,500,000	20	10,000,000	20	15,000,000	
1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan diLuar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	5	6,000,000	5	7,000,000	5	8,000,000	5	9,000,000	5	10,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					6,199,899,609		6,851,000,000		6,985,000,000		7,037,000,000		7,113,000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan	Persentase Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan	Persentase	100	100	292,786,424	100	327,000,000	100	355,000,000	100	365,000,000	100	382,000,000	
1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	75	32,931,424	75	37,000,000	75	40,000,000	75	40,000,000	75	47,000,000	
1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	80	49,855,000	80	60,000,000	80	65,000,000	80	65,000,000	80	65,000,000	
1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5	90,000,000	5	100,000,000	5	110,000,000	5	115,000,000	5	120,000,000	
1.06.04.2.02.0015 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)														
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		160	45,000,000	160	50,000,000	160	55,000,000	160	55,000,000	160	60,000,000	
1.06.04.2.02.0016 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya														
Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang		120	50,000,000	120	50,000,000	120	50,000,000	120	50,000,000	120	50,000,000	
1.06.04.2.02.0017 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Aduan		12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					6,199,899,609		6,851,000,000		6,985,000,000		7,037,000,000		7,113,000,000	
Meningkatnya Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Persentase	100	100	5,223,427,600	100	5,767,000,000	100	5,845,000,000	100	5,860,000,000	100	5,887,000,000	
1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan														
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16736	5000	4,620,000,000	5000	5,080,000,000	5000	5,100,000,000	5000	5,100,000,000	5000	5,110,000,000	
1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang														
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	48	500	49,008,000	500	75,000,000	500	100,000,000	500	105,000,000	500	110,000,000	
1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	36	44	130,000,000	44	145,000,000	44	155,000,000	44	155,000,000	44	160,000,000	
1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	50	390,928,000	50	430,000,000	50	450,000,000	50	455,000,000	50	460,000,000	
1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	90	33,491,600	90	37,000,000	90	40,000,000	90	45,000,000	90	47,000,000	
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					6,199,899,609		6,851,000,000		6,985,000,000		7,037,000,000		7,113,000,000	
Meningkatnya Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase	100	100	683,685,585	100	757,000,000	100	785,000,000	100	812,000,000	100	844,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8903	1000	557,144,680	1000	615,000,000	1000	625,000,000	1000	630,000,000	1000	645,000,000	
1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan														
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	110	100	36,840,905	100	41,000,000	100	45,000,000	100	47,000,000	100	50,000,000	
1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	12	45,000,000	12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	
1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	14,900,000	20	17,000,000	20	20,000,000	20	25,000,000	20	28,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	14,900,000	20	17,000,000	20	20,000,000	20	25,000,000	20	28,000,000	
1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan														
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	20	14,900,000	20	17,000,000	20	20,000,000	20	25,000,000	20	28,000,000	
1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					5,544,985,618		6,131,620,837		6,386,951,791		6,433,852,459		6,544,481,421	
Menurunnya kerentanan anak terlantar melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran	Persentase Anak Terlantar yang mendapat perlindungan sosial	Persentase	100	100	5,544,985,618	100	6,131,620,837	100	6,386,951,791	100	6,433,852,459	100	6,544,481,421	
Menurunnya kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran	Persentase Warga Miskin yang mendapat jaminan sosial	Persentase	100	100		100		100		100		100		
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					203,324,125		241,620,837		281,951,791		298,852,459		354,481,421	
Meningkatnya Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Persentase Anak - Anak Terlantar yang mendapatkan Perlindungan Sosial	Persentase	100	100	203,324,125	100	241,620,837	100	281,951,791	100	298,852,459	100	354,481,421	
1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
Terlaksananya Penjangkuan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-AnakTerlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	72,947,935	10	81,620,837	10	91,951,791	10	98,852,459	10	104,481,421	
1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar														
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-AnakTerlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	40,334,960	10	50,000,000	10	60,000,000	10	65,000,000	10	85,000,000	
1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenanangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	40,041,230	10	50,000,000	10	60,000,000	10	65,000,000	10	85,000,000	
1.06.05.2.01.0004 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi														
Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	0	12	50,000,000	12	60,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					5,341,661,493		5,890,000,000		6,105,000,000		6,135,000,000		6,190,000,000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari kemiskinan	Persentase	0.3	2.1	1,737,659,688	2.1	1,910,000,000	2.1	1,955,000,000	2.1	1,975,000,000	2.1	2,000,000,000	
1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	249,563	100,000	1,324,872,048	100,000	1,450,000,000	100,000	1,475,000,000	100,000	1,485,000,000	100,000	1,500,000,000	
1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	0	4	412,787,640	4	460,000,000	4	480,000,000	4	490,000,000	4	500,000,000	
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					5,341,661,493		5,890,000,000		6,105,000,000		6,135,000,000		6,190,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Persentase Warga Miskin dan Pekerja Rentan Miskin yang menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	Persentase		100	3,176,261,250	100	3,500,000,000	100	3,600,000,000	100	3,605,000,000	100	3,610,000,000	
1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang MendapatkanBantuanSosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan BantuanSosialKesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60,000	50,000	3,076,261,250	50,000	3,400,000,000	50,000	3,500,000,000	50,000	3,505,000,000	50,000	3,510,000,000	
1.06.05.2.02.0009 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin														
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial KetenagakerjaanKewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	18	100,000,000	19	100,000,000	20	100,000,000	21	100,000,000	22	100,000,000	
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					5,341,661,493		5,890,000,000		6,105,000,000		6,135,000,000		6,190,000,000	
Meningkatnya Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha bagi Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha	Persentase	0	100	427,740,555	100	480,000,000	100	550,000,000	100	555,000,000	100	580,000,000	
1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
Terpenuhinya Orang Yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	327,740,555	100	370,000,000	100	430,000,000	100	430,000,000	100	440,000,000	
1.06.05.2.02.0010 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota														
Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	0	15	100,000,000	20	110,000,000	25	120,000,000	30	125,000,000	35	140,000,000	
1.06.06 Program Penanganan Bencana					977,292,793		1,080,686,095		1,125,687,672		1,133,953,823		1,153,451,960	
Meningkatnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pasca bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	Persentase	100	100	977,292,793	100	1,080,686,095	100	1,125,687,672	100	1,133,953,823	100	1,153,451,960	
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					605,292,793		670,686,095		695,687,672		701,953,823		715,451,960	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase	100	100	605,292,793	100	670,686,095	100	695,687,672	100	701,953,823	100	715,451,960	
1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Haridalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Haridalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1,323	1,350	181,292,793	1,400	220,686,095	1,450	225,687,672	1,500	226,953,823	1550	227,451,960	
1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yangTersedia pada MasaTanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yangTersedia pada MasaTanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	698	700	80,000,000	750	85,000,000	800	90,000,000	850	91,000,000	900	95,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	5	10	30,000,000	15	35,000,000	20	40,000,000	25	41,000,000	30	44,000,000	
1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	122	130	75,000,000	135	85,000,000	140	90,000,000	145	92,000,000	150	95,000,000	
1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial														
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	19	285	239,000,000	290	245,000,000	295	250,000,000	300	251,000,000	305	254,000,000	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					372,000,000		410,000,000		430,000,000		432,000,000		438,000,000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota	Persentase	100	100	372,000,000	100	410,000,000	100	430,000,000	100	432,000,000	100	438,000,000	
1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	3	3	62,843,750	3	62,906,250	3	63,435,714	3	63,685,714	3	64,285,714	
1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	32,843,750	60	32,905,250	60	33,435,714	60	33,685,714	60	34,485,714	
1.06.06.2.02.0003 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda														
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	0	29	28,968,750	29	29,031,250	29	29,560,714	29	29,810,714	29	30,610,714	
1.06.06.2.02.0004 Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam														
Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	0	75	34,718,750	75	34,781,250	75	35,310,714	75	35,560,714	75	36,560,714	
1.06.06.2.02.0005 Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana														
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Kampung	0	5	87,843,750	8	125,406,250	11	141,700,000	14	141,950,000	16	142,550,000	
1.06.06.2.02.0006 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana														
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	0	60	32,843,750	60	32,906,250	60	33,435,716	60	33,685,716	60	34,485,716	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.06.2.02.0008 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah														
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	0	180	47,843,750	180	47,906,250	180	48,435,714	180	48,685,714	180	49,285,714	
1.06.06.2.02.0011 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana														
Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	0	150	44,093,750	150	44,157,250	150	44,685,714	150	44,935,714	150	45,735,714	
1.06.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14,251,677,012		15,866,926,988		16,569,958,963		16,699,095,947		17,003,703,348	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Sosial	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas	Persentase	100	100	14,251,677,012	100	15,866,926,988	100	16,569,958,963	100	16,699,095,947	100	17,003,703,348	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial	Persentase	100	100		100		100		100		100		
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45,150,000		45,150,000		45,150,000		45,150,000		40,150,000	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Persentase	100	100	45,150,000	100	45,150,000	100	45,150,000	100	45,150,000	100	40,150,000	
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	6	6,000,000	
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1,250,000	1	1,250,000	1	1,250,000	1	1,250,000	1	1,250,000	
X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1,900,000	1	1,900,000	1	1,900,000	1	1,900,000	1	1,900,000	
X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	
X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1,900,000	1	1,900,000	1	1,900,000	1	1,900,000	1	1,900,000	
X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	20	6,000,000	20	6,000,000	20	6,000,000	20	6,000,000	20	6,000,000	
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	17	1,600,000	17	1,600,000	17	1,600,000	17	1,600,000	17	1,600,000	
X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	20,000,000	
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11,710,413,882		12,288,899,576		12,895,826,555		13,532,645,383		14,170,787,652	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Persentase	100	100	11,710,413,882	100	12,288,899,576	100	12,895,826,555	100	13,532,645,383	100	14,170,787,652	
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40	81	11,364,513,882	81	11,932,739,576	81	12,529,376,555	81	13,155,845,383	81	13,813,637,652	
X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2	340,000,000	2	350,000,000	2	360,000,000	2	370,000,000	2	350,000,000	
X.XX.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	8	1	800,000	1	810,000	1	850,000	1	900,000	1	950,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen	1	2	1,250,000	2	1,300,000	2	1,400,000	2	1,500,000	2	1,600,000	
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12	24	2,600,000	24	2,700,000	24	2,800,000	24	2,900,000	24	3,000,000	
X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1,250,000	1	1,350,000	1	1,400,000	1	1,500,000	1	1,600,000	
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					47,425,000		51,717,200		56,408,920		61,569,812		67,246,793	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Sosial	Persentase layanan kepegawaian Dinas Sosial	Persentase	0	100	47,425,000	100	51,717,200	100	56,408,920	100	61,569,812	100	67,246,793	
X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	12	4,800,000	12	4,800,000	12	4,800,000	12	4,800,000	12	4,800,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	40	42,625,000	40	46,917,200	40	51,608,920	40	56,769,812	40	62,446,793	
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					541,891,753		536,015,989		551,617,588		407,193,802		293,413,182	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial	Persentase	100	100	541,891,753	100	536,015,989	100	551,617,588	100	407,193,802	100	293,413,182	
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	12	6,000,000	12	6,600,000	12	7,260,000	12	7,986,000	12	8,784,600	
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	57,539,854	12	63,293,839	12	69,623,223	12	70,000,000	6	30,000,000	
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	53	12	7,000,000	12	7,700,000	12	8,470,000	12	9,317,000	12	10,248,700	
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	50	50	33,656,500	50	37,022,150	50	40,724,365	50	44,796,802	50	49,276,482	
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	7100	10	32,400,000	10	35,640,000	10	39,204,000	10	43,124,400	10	47,436,840	
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	38	36	5,760,000	36	5,760,000	36	6,336,000	36	6,969,600	36	7,666,560	
X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu														
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	81	80	80,000,000	80	80,000,000	80	80,000,000	50	50,000,000	40	40,000,000	
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	82	75	90,000,000	75	90,000,000	75	90,000,000	50	90,000,000	35	90,000,000	
X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	
X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	9	16	219,535,399	16	200,000,000	16	200,000,000	8	100,000,000	4	50,000,000	
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					75,000,000		741,168,209		682,582,283		216,325,972		135,375,600	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase	100	100	75,000,000	100	741,168,209	100	682,582,283	100	216,325,972	100	135,375,600	
X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Unit	4	1	25,000,000	3	75,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	2	20,000,000	50	164,232,909	66	180,656,199.90	15	43,134,500	13	35,375,600	
X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	4	1	30,000,000	1	501,935,300	1	451,926,083	1	113,191,472.30	1	30,000,000	
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,080,042,100		1,188,046,310		1,306,850,941		1,437,536,035		1,531,467,404	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Sosial yang selesai ditindaklanjuti	Persentase	100	100	1,080,042,100	100	1,188,046,310	100	1,306,850,941	100	1,437,536,035	100	1,531,467,404	
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	141,860,980	12	156,047,078	12	171,651,786	12	188,816,964	12	207,698,661	
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	12	938,181,120	12	1,031,999,232	12	1,135,199,155	12	1,248,719,071	12	1,323,768,743	
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					751,754,277		1,015,929,704		1,031,522,676		998,674,943		765,262,718	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial sesuai ketentuan	Persentase	100	100	751,754,277	100	1,015,929,704	100	1,031,522,676	100	998,674,943	100	765,262,718	
X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39,603,603	1	43,563,963	1	47,920,360	1	52,712,396	1	57,983,635	
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	38	510,000,000	38	510,000,000	38	510,000,000	38	510,000,000	38	510,000,000	
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel														
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	225	10	32,292,250	10	35,521,475	10	39,073,623	10	42,980,985	10	47,279,083	
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	50,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	200,000,000	1	50,000,000	
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	
X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	144	2	69,858,424	2	76,844,266	2	84,528,693	2	92,981,562	1	50,000,000	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Sosial Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang
Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	5,13	5,04	4,95	4,86	4,77	4,68	Jumlah PPKS ---------- X 100% Jumlah Penduduk Kota Semarang
2	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah PPKS yang ditangani ---------- X 100% Jumlah PPKS Kota Semarang
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ---------- X 100% Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----------X 100% Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Semarang

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ---------- X 100% Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----------X 100% Populasi Penyandang Anak Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti
	b. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----------X 100% Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----------X 100% Populasi Penyandang Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti
	d. Persentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----------X 100% Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA						KET

			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----------X 100% Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
	a. Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Korban Bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----------X 100% Populasi Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
	b. Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapatkan perlindungan sosial ----------X 100% Populasi Korban Bencana sosial yang membutuhkan bantuan Perlindungan Sosial

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan sosial dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Sosial Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kota Semarang.

Permasalahan sosial sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Sosial Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan sosial secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

11. DINAS TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang maka Dinas Tenaga Kerja wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidan tenaga kerja, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder Bidang Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang tenaga kerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja

kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 100 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja dan UPTD;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

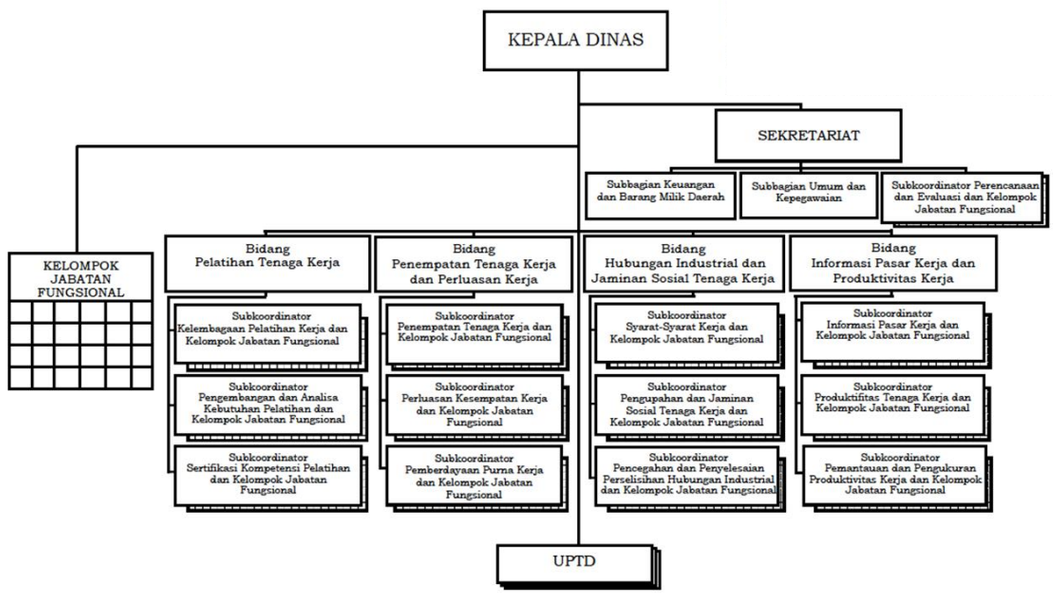

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   - Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja;
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja;
7. UPTD; dan
8. Jabatan Fungsional.

b. Uraian Tugas dan Jabatan Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, uraian tugas jabatan structural Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretaris

   - Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas:
   - Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktifitas Kerja dan UPTD.
   - Sekretaris diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepadanya yaitu sebagai Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi, yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota kepada Sekretaris.
   - Sekretaris membawahi subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:
   - Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   - Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   - Menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
   - Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
   - Menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
   - Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
   - Menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
   - Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Dinas;
   - Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   - Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
- Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
- Menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
- Menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- Menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
- Menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
- Menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
- Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:
- Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
- Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;

- Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Dinas;
- Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- Menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
- Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
- Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
- Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
- Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
- Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja

   - Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
   - Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Kelembagaan Pelatihan Kerja, Pengembangan, Analisa Kebutuhan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Pelatihan.
   - Diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

   - Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
   - Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Pemberdayaan Purna Kerja.
   - Diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

   - Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
   - Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
   - Diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

6. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktifitas Kerja

- Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Informasi Pasar Kerja, Produktifitas Tenaga Kerja, dan Pemantauan dan Pengukuran Produktivitas Kerja.
- Diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya.

7. UPTD Balai Latihan Kerja

- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja UPTD diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

8. Jabatan fungsional

- Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dapat menjalankan tugasnya bekerja secara individu/mandiri dan/atau tim kerja/kelompok.
- Pelaksanaan tugas dalam tim kerja/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penunjukan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai kompetensi Pejabat Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam dua tabel. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	2	-	7	4	13
2	D3	-	1	-	-	1
3	S1/ D4	21	24	7	7	59
4	S2	7	4	-	-	11
5	S3	1	-	-	-	1

Dari jumlah pegawai sebanyak 85 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	1	3
2	Golongan III	24	24	48
3	Golongan IV	5	4	9

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset Tanah Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m^2)	Tahun Pengadaan	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga
				Hak	Sertifikat				
					Tanggal	Nomor			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.000	1997	Hak Pakai	1996-8-9	HP 26	Bangunan Gedung Kantor DIsnaker Kota Semarang	Hibah Depnaker RI Jakarta diperuntukan Disnaker Kota Semarang	1.761.816.462
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.142	1994	Hak Pakai	Belum Sertifikat	-	Bangunan Kantor dan Gedung BLK Gayamsari	Tanah Bengkok Lurik	1.992.000.000
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.500	1976	Hak Pakai	Belum Sertifikat	-	Bangunan Kantor dan Gedung BLK Mijen		875.000.000

Tabel 2.4
Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah	Asal Usul
1	Gedung Bangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	B	800	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Kota Semarang	800	HP 36	Hibah Depnaker RI Jakarya diperuntukkan Disnaker Kots Semarang
2	Gedung Bangunan Kantor BLK Gayamsari	B	644	Jl Slamet Riyadi No. 6A Kota Semarang	644	Belum Sertifikat	Eks Tanah Bengkok Lurik
3	Gedung Bangunan Kantor BLK Mijen	B	1.104	Jl. RM Hadi Soebeno S. No. 122 Kota Semarang	1.104	Belum Sertifikat	Menempati tanah Pemprov Jateng
4	Gedung Bangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	KB	1.072	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Kota Semarang	1.072	-	Hibah dari BLH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah	Asal Usul
	(Bidang HI)						
5	R. Khusus Merokok (Smoking Room)	KB	9	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Kota Semarang	9	-	Menempati tanah Pemprov Jateng
6	Bangunan Gedung Gudang Tertutup	KB	32	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Kota Semarang	32	-	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Tenaga Kerja.

a. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan tenaga kerja yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Taget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisai Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	**Tujuan Sarana dan IKK**																		
1	Tingkat Pengagguran Terbuka	%			4,77	9,30	9,00	8,60	8,00	9,57	9,54	7,60	5,99	5,82	-0,62	97,42	115,55	130,34	127,25
2	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja dalam setiap tahunnya	%			N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	4,93	2,53	2,89	N/A	N/A	246,5	126,5	144,5
3	Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi	%			74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	74,00	68,14	72.74	77.09	79,06	100,00	90,85	95,71	100,11	101,35
4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	%			50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	52,83	53,71	61.11	70.51	68,25	105,66	103,29	113,16	125,91	117,67
5	Nilai AKIP	-			N/A	N/A	70	71	72	N/A	N/A	71.91	76.65	83,45	N/A	N/A	102,72	107,95	115,90
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang	%			N/A	N/A	60	65	70	78	79	80,95	80,95	100	N/A	N/A	134,92	124,54	142,85

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Taget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisai Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	mengacu ke rencana tenaga kerja																		
7	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	%								N/A	N/A	N/A	66,9	17,42					
8	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah/ Org								148.612.539	154.592.857	153.908.817	175.185.170	181.547.565					
9	Persenttase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola yang layak	%								5.34	6.06	66.94	90.40	90.57					
10	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%								67.75	91.6	97.3	99.03	122.91					
II	**Indikator Kinerja Daerah**																		
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%								68,89	69,41	70,96	69,42	69,88					
12	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%								90,43	90,43	92,40	94,01	94,18					

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Taget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisai Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Org								1.191.265	1.490.742	1.516.197	1.338.215	1.354.593					
14	Angkatan Kerja	Org								1.023.964	1.034.794	1.075.827	929.014	946.618					
15	Bukan Angakatan Kerja	Org								441.157	455.948	440.370	409.201	407.975					

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tenaga Kerja

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Tenaga Kerja. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Tenaga Kerja. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pendapatan
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

URAIAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Retribusi Izin Menggunakan tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.500.000.000	4.000.000.000	2.200.000.000	4.400.000.000	5.141.230.800	5.084.298.200	4.038.202.080	1.870.156.894	5.913.064.467	6.609.798.412	145,27%	100,9%	85,00%	134,38%	128,56%

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

OPD	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	3.493.029.000	15.792.121.269	16.659.791.529	18.328.525.696	17.426.385.847	3.395.038.455	14.253.710.171	15.532.570.122	17.359.909.416	16.663.697.865	97,19%	90,26%	93,23 %	94,72 %	95,62%	0,91	0,84

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Kesenjangan Kompetensi Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Industri

   Perkembangan teknologi dan pola kerja baru memunculkan kebutuhan keterampilan yang berubah cepat, sementara sebagian besar pencari kerja dan pekerja belum memiliki kompetensi yang sesuai.
2. Peningkatan Jumlah Pengangguran Terdidik dan PHK

   Fluktuasi ekonomi, disrupsi teknologi, dan perubahan model bisnis berpotensi meningkatkan jumlah lulusan baru yang belum terserap pasar kerja serta pekerja yang terkena PHK.
3. Keterbatasan Akses Masyarakat Rentan

   Kelompok marginal dan rentan, termasuk pekerja informal dan difabel, masih menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi, pelatihan, maupun kesempatan kerja yang setara.
4. Perlindungan Tenaga Kerja yang Belum Optimal

   Masih ditemui kasus hubungan industrial yang kurang harmonis, pelanggaran norma ketenagakerjaan, serta perlindungan hukum yang belum maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja di sektor informal.
5. Kapasitas dan Sinergi Antar Lembaga yang Terbatas

   Kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan instansi terkait belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga potensi kolaborasi belum optimal.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Tenaga Kerja untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital

   Pengembangan platform layanan ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi, termasuk sistem informasi pasar kerja online, e-pelatihan, dan layanan konsultasi daring, untuk memperluas jangkauan dan efisiensi pelayanan.
2. Peningkatan Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri

   Pelaksanaan program pelatihan berbasis kebutuhan industri (demand driven training) melalui kerja sama strategis dengan perusahaan dan asosiasi industri guna memastikan relevansi kompetensi lulusan pelatihan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Rentan

   Pengembangan program khusus bagi kelompok marginal, seperti pelatihan kerja vokasi, sertifikasi keterampilan, dan fasilitasi penempatan kerja yang ramah difabel dan inklusif.
4. Optimalisasi Peran Lembaga Pelatihan Kerja

   Memperkuat kapasitas dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pemerintah dan swasta agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, bersertifikat, dan siap bersaing di pasar kerja lokal maupun global.

5. Sinergi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah

Membangun kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga pendidikan, perangkat daerah, dan instansi vertikal untuk mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Tenaga Kerja diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Tenaga Kerja telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Wali Kota Semarang Nomor 100 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Tenaga Kerja, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja yaitu: “Masih Tingginya Tingkat Pengangguran” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Rumusan Permasalahan
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

No.	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum sesuainya kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja	a) Masih kurangnya kolaborasi antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan dunia usaha b) Ketidaksesuaian data profil pencari kerja dengan kebutuhan industri
2	Kuranganya minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan	a) Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan pelatihan kerja b) Kurang sesuainya jenis pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja c) Kualitas pelatihan yang belum optimal
3	Kurang optimalnya penyediaan informasi lowongan kerja yang berkualitas	a) Minimnya kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dengan dunia usaha dan industri dalam menyediakan data lowongan kerja terkini b) Belum optimalnya validasi dan verifikasi lowongan pekerjaan
4	Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap pekerja	a) Masih rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan b) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pekerja dan pemberi kerja tentang pentingnya perlindungan sosial
5	Belum optimalnya pelayanan internal dalam mendukung kinerja	a) Minimnya komunikasi dan koordinasi antarbagian/unit kerja b) Kurangnya evaluasi dan tindak lanjut terhadap kualitas pelayanan internal

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, bidang ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Arah kebijakan nasional menekankan pada penciptaan lapangan kerja layak, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar, serta perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja.

Secara global, terdapat sejumlah isu utama yang memengaruhi dinamika ketenagakerjaan nasional, yaitu:

1) Transformasi digital dan otomatisasi yang mengubah struktur permintaan tenaga kerja dan menuntut penguasaan keterampilan baru, khususnya keterampilan digital dan adaptasi teknologi.
2) Perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau yang membuka peluang pekerjaan baru di sektor ramah lingkungan, namun juga menuntut peralihan keterampilan bagi pekerja di sektor terdampak.
3) Perubahan rantai pasok global dan mobilitas tenaga kerja internasional yang menuntut daya saing kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja global.

Pada tingkat nasional, RPJMN 2025–2029 mengidentifikasi isu-isu pokok ketenagakerjaan sebagai berikut:

1) Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri (link-and-match) yang masih tinggi, sehingga memerlukan peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi.
2) Tingginya proporsi pekerja informal yang belum memiliki perlindungan sosial memadai.
3) Kebutuhan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui penguatan sektor-sektor prioritas padat karya dan peningkatan investasi.
4) Penguatan sistem data dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran.

Telaahan ini menjadi dasar untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah, khususnya di bidang ketenagakerjaan, selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam periode RPJMN 2025–2029.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam Masyarakat. Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang tenaga kerja, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah "Menurunnya kemiskinan secara inklusif". Dengan sasaran "Meningkatnya akses lapangan kerja, melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)."

Dinas Tenga Kerja secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai sasaran "Meningkatnya akses lapangan kerja", melalui indkator "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)" dan "Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)."

c. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan tujuan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Renstra ini menjadi pedoman kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan, yang menekankan peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja layak, perluasan perlindungan pekerja, serta penguatan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi.

Secara umum, arah kebijakan nasional bidang ketenagakerjaan dalam Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2025–2029 difokuskan pada:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja
   - Memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi dan sesuai kebutuhan industri.
   - Melaksanakan program upskilling dan reskilling secara masif untuk menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi.
   - Memperluas akses sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang kredibel.
2. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif
   - Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui penguatan investasi, pengembangan kewirausahaan, dan sektor padat karya.
   - Memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyerap tenaga kerja lokal.
   - Memperluas program padat karya tunai dan padat karya produktif di berbagai sektor.
3. Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
   - Memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal.
   - Memperkuat pengawasan norma ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).
   - Meningkatkan akses dan kepesertaan pekerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja
   - Mengembangkan basis data ketenagakerjaan yang terintegrasi secara nasional dan daerah.
   - Menyediakan informasi pasar kerja yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh pencari kerja, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lainnya.
   - Memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan ketenagakerjaan.
5. Kolaborasi dan Sinergi Multi-Pemangku Kepentingan

- Meningkatkan koordinasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.
- Memperkuat kemitraan internasional untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja dan perluasan pasar kerja luar negeri.

d. Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja" dengan indicator tujuan "Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR : Employment to Population Ratio)".

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah "Sasaran 1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja; Sasaran 2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja; 3. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja."

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur struktur ruang, pola ruang, dan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Semarang dalam jangka panjang. RTRW memuat kebijakan dan strategi penataan ruang yang menjadi acuan bagi perangkat daerah yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang, pembangunan fisik, dan pengendalian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan hasil telaahan, substansi RTRW Kota Semarang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025–2029. Hal ini dikarenakan RTRW lebih berfokus pada pengaturan tata ruang dan penetapan zonasi wilayah, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja berada pada bidang pelayanan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan yang tidak secara eksplisit diatur dalam RTRW.

Meskipun demikian, keberadaan RTRW tetap menjadi salah satu acuan umum dalam pelaksanaan program Dinas Tenaga Kerja, khususnya dalam konteks penyesuaian lokasi layanan atau kegiatan pelatihan kerja agar tidak bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Semarang, tidak ditemukan keterkaitan langsung antara arah kebijakan, program, maupun isu strategis yang termuat dalam KLHS dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025–2029. Hal ini disebabkan fokus KLHS yang lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam, sedangkan Renstra Dinas Tenaga Kerja berfokus pada peningkatan kualitas, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, tidak ada penyesuaian atau integrasi

kebijakan yang diperlukan secara langsung dari KLHS ke dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang periode ini.

g. Telaahan Dokumen Lainnya

I. PUG ARG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang wajib diterapkan oleh setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang PUG. Integrasi PUG dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja 2025–2029 bertujuan memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan secara adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Isu strategis yang diidentifikasi dalam laporan PUG, seperti rendahnya kesempatan kerja bagi perempuan, menjadi salah satu dasar perumusan strategi dan sasaran Renstra. Hal ini diwujudkan melalui program prioritas, antara lain penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro/Mikro yang memuat data terpilah gender, pelatihan berbasis kompetensi yang terbuka bagi perempuan dan laki-laki, serta fasilitasi penempatan kerja dan kewirausahaan yang inklusif. Dengan demikian, implementasi Renstra tidak hanya menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan tercapainya kesetaraan kesempatan kerja di Kota Semarang.

II. Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi acuan penting bagi Dinas Tenaga Kerja dalam penyusunan Renstra 2025–2029. Peraturan Daerah ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk menjamin pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini sejalan dengan tugas Disnaker dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, aman, dan bebas dari praktik pekerja anak.

Dalam implementasinya, Renstra Disnaker berkontribusi terhadap pencapaian indikator Kota Layak Anak melalui penguatan program pengawasan ketenagakerjaan, sosialisasi pencegahan pekerja anak, penyediaan fasilitas pelatihan kerja yang ramah anak dan remaja, serta koordinasi dengan dunia usaha untuk memastikan penerapan norma ketenagakerjaan yang melindungi pekerja muda. Integrasi ini mendukung terwujudnya Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak serta mendorong pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

III. GDPK

Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Semarang Tahun 2020–2045 menjadi pedoman pembangunan kependudukan yang berfokus pada pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Dokumen ini menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi

dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi tenaga kerja yang produktif, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Renstra Dinas Tenaga Kerja 2025–2029 mendukung implementasi GDPK melalui program peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan lembaga pelatihan kerja, dan penguatan sistem informasi pasar kerja. Hal ini sejalan dengan pilar GDPK, khususnya pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga, yang diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan layak. Dengan demikian, Renstra Disnaker menjadi salah satu instrumen kunci untuk mengoptimalkan momentum bonus demografi di Kota Semarang dan memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

IV. Kecamatan Berdaya

Program Kecamatan Berdaya di Kota Semarang dirancang untuk memperkuat peran kecamatan sebagai pusat penggerak pembangunan berbasis masyarakat, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Program ini mendorong identifikasi potensi tenaga kerja lokal, pemetaan kebutuhan pelatihan, serta fasilitasi akses masyarakat terhadap program peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja. Melalui dukungan kolaboratif antara pemerintah kota, perangkat daerah, dunia usaha, dan komunitas lokal, Kecamatan Berdaya menjadi wadah pemberdayaan warga agar lebih produktif, berdaya saing, dan siap memasuki pasar kerja.

Selain itu, program ini mendorong pengembangan wirausaha baru dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat kecamatan sebagai salah satu strategi menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, Kecamatan Berdaya berkontribusi langsung pada pengurangan pengangguran, peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, dan pencapaian target pembangunan ketenagakerjaan dalam Renstra Kota Semarang.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut:

Tabel 2.9
Isu Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target/ Isu			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1) Letak geografis strategis dengan dukungan pelabuhan, bandara, dan tol, membuka peluang kerja di logistik, perdagangan, dan pariwisata. 2) Pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Tengah, khususnya industri manufaktur, jasa, dan UMKM. 3) Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja. 4) Keberagaman sektor industri dan ekonomi kreatif yang terus berkembang. 5) Infrastruktur perkotaan lengkap serta perkembangan digitalisasi layanan publik dan dunia usaha. 6) Masyarakat beretos kerja baik, adaptif terhadap teknologi, dan perubahan pasar kerja. 7) Kemitraan aktif dengan asosiasi pengusaha dan dunia industri dalam penyediaan informasi lowongan dan pelatihan kerja.	1) Belum sesuainya kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja 2) Kuranganya minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan 3) Kurang optimalnya penyediaan informasi lowongan kerja yang berkualitas 4) Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap pekerja 5) Belum optimalnya pelayanan internal dalam mendukung kinerja	-	1) Transformasi digital dan otomatisasi yang mengubah kebutuhan keterampilan tenaga kerja, menuntut penguasaan teknologi dan keterampilan digital. 2) Perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau yang menciptakan peluang kerja baru di sektor ramah lingkungan dan membutuhkan penyesuaian keterampilan. 3) Perubahan rantai pasok global dan mobilitas tenaga kerja internasional yang menuntut peningkatan daya saing kompetensi tenaga kerja.	1) Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri (link and match) yang masih tinggi. 2) Tingginya proporsi pekerja informal yang belum memiliki perlindungan sosial memadai. 3) Kebutuhan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui penguatan sektor padat karya dan peningkatan investasi. 4) Kelemahan sistem data dan informasi ketenagakerjaan yang memerlukan penguatan berbasis teknologi.	1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih perlu ditekan melalui peningkatan akses lapangan kerja. 2) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja daerah. 3) Terbatasnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, khususnya di sektor-sektor strategis daerah. 4) Perlunya peningkatan kemitraan daerah dengan dunia usaha dan industri untuk penyerapan tenaga kerja lokal.	1) Bonus demografi sebagai peluang dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan 2) Perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan 3) Optimalisasi penyediaan informasi lowongan kerja yang berkualitas 4) Optimalisasi perlindungan sosial terhadap pekerja 5) Optimalisasi pelayanan internal dalam mendukung kinerja

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBAJIKAN

3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang tenaga kerja. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Tenaga Kerja. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas, Produktif dan Sejahtera”

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan;
2. Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial yang Kondusif dan Berkeadilan;
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Meningkatnya akses lapangan kerja	1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas, Produktif dan Sejahtera		Persentase Pengangguran yang tertangani	%	11	12	12,5	13	13,5	(Pencaker terdaftar yang ditempatkan + Peserta pelatihan yang terdaftar + Jumlah peserta JKK JKM Pekerja rentan) / Jumlah Pengangguran pada Tahun N (data BPS)
		1.1 Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan	1.1.1 Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	((Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan tahun N / jumlah pencari kerja yang terdaftar AK1 pada tahun N) x 100%) - ((Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan tahun N-1 / jumlah pencari kerja yang terdaftar AK1 pada tahun N-1) x 100%)
			1.1.2 Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru	%	2	2	2	2	2	Persentase Peserta Pelatihan yang menjadi Wirausaha Baru tahun N - Persentase Peserta Pelatihan yang menjadi Wirausaha Baru tahun N-1
			1.1.3 Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas	%	1	1	1	1	1	Persentase Lowongan Pekerjaan Berkualitas Tahun N - Persentase Lowongan Pekerjaan Berkualitas Tahun N-1
			1.1.4 Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja	%	38,5	40,0	41,5	43,0	44,5	(Jml peserta pelatihan/ Jml pendaftar pelatihan) x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang Mengikuti Pelatihan Kerja							
			1.1.5 Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	3	3	3	3	3	Nilai Produktivitas Tahun N - Nilai Produktivitas Tahun N-1
		1.2 Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial yang Kondusif dan Berkeadilan	1.2.1 Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan	%	70,87	70,99	71,11	71,23	71,35	Jml Kasus yang terselesaikan / Jml Kasus yang tercatat x 100%
		1.3 3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	1.3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Tenaga Kerja	Angka	79,35	79,50	79,65	79,75	79,90	Diambil dari angka yang dikeluarkan oleh Inspektorat
			1.3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	Angka	98,57	98,58	98,59	98,6	98,61	Diambil dari AsikMas milik Bag. Organisasi

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Tenaga Kerja mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja ada enam yaitu:

1) Meningkatkan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja
2) Meningkatkan minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan
3) Pengoptimalan Keselarasan Kebijakan Ketenagakerjaan Lokal dengan Dinamika Dunia Usaha dan Dunia Industri
4) Pengoptimalan Pelatihan Kerja yang Inklusif, Adaptif, dan Berdampak pada Performa Usaha serta Kualitas Output
5) Pengoptimalan Lingkungan Kerja yang Adil dan Menjamin Hak dan Kesejahteraan Pekerja
6) Peningkatan Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah

Dari strategi tersebut dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Strategi	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	Meningkatkan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja	Memperluas jejaring kemitraan dengan sektor industri baru dan emerging markets	Memperbarui standar kompetensi pelatihan sesuai perkembangan teknologi dan tren kerja global	Mengintegrasikan data lulusan pelatihan dan lowongan kerja dalam satu sistem terpusat	Melakukan tracking keberhasilan penempatan tenaga kerja hingga minimal 1 tahun setelah bekerja	Menyusun rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis data evaluasi
2	Meningkatkan minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan	Meningkatkan promosi berbasis kisah sukses alumni pelatihan	Menambah variasi pelatihan berbasis minat dan potensi daerah	Menyediakan pelatihan fleksibel (blended learning/ hybrid)	Mengadakan lomba keterampilan pasca-pelatihan sebagai ajang publikasi dan motivasi	Melakukan survei persepsi masyarakat secara berkala untuk mengukur peningkatan minat
3	Pengoptimalan Keselarasan Kebijakan Ketenagakerjaan Lokal dengan Dunia Usaha & Industri	Mengupdate regulasi daerah agar sinkron dengan kebijakan nasional terbaru	Menetapkan forum koordinasi rutin minimal triwulanan dengan stakeholder ketenagakerjaan	Menyusun peta jalan (roadmap) keselarasan kebijakan jangka menengah	Memperkuat sistem monitoring implementasi kebijakan di tingkat perusahaan	Menyediakan laporan publik atas hasil evaluasi kebijakan secara transparan
4	Pengoptimalan Pelatihan Kerja yang Inklusif, Adaptif, dan Berdampak	Memperluas akses pelatihan bagi daerah pinggiran dan kelompok rentan	Meningkatkan penggunaan teknologi simulasi atau peralatan terbaru di pelatihan	Menjalin kolaborasi dengan perusahaan untuk program magang langsung pasca-pelatihan	Mengukur dampak pelatihan terhadap peningkatan pendapatan peserta	Menyempurnakan kurikulum berdasarkan masukan industri dan alumni
5	Pengoptimalan Lingkungan Kerja yang Adil dan Menjamin Hak & Kesejahteraan Pekerja	Memperluas cakupan inspeksi ketenagakerjaan ke sektor informal dan UMKM	Mengoptimalkan kanal pengaduan digital untuk mempercepat respon kasus	Melakukan kampanye perusahaan ramah pekerja (decent work campaign)	Mendorong perjanjian kerja bersama (PKB) yang mengakomodasi kesejahteraan pekerja	Mengukur indeks kepuasan pekerja terhadap lingkungan kerja setiap tahun
6	Peningkatan Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan integrasi antar-aplikasi layanan ketenagakerjaan di internal	Memperluas pelatihan pegawai pada bidang data analytics dan pelayanan digital	Menyediakan dashboard kinerja yang bisa dipantau pimpinan secara real-time	Melakukan audit mutu layanan secara periodik	Memberikan penghargaan kinerja internal berbasis inovasi layanan

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Tenaga Kerja agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Tenaga Kerja merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Dalam konteks tersebut, salah satu kebijakan Dinas Tenaga Kerja adalah pengawalan dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Semarang secara tepat dan berkeadilan. Kebijakan ini bertujuan memastikan kesejahteraan pekerja melalui penyesuaian upah yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak (KHL) tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha bagi pelaku industri. Pengaturan dan evaluasi kenaikan UMK dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif bagi perkembangan ekonomi daerah. Berikut adalah table arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	13. Meningkatnya akses lapangan kerja	Penyediaan pelatihan kerja berbasis industri dan kebutuhan pasar tenaga kerja	Penguatan kolaborasi strategis antara lembaga pendidikan, pelatihan kerja dan sektor industri	
			Pengembangan sistem data tenaga kerja yang akurat, terpadu, dan berbasis kebutuhan industri	
			Penguatan informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan pelatihan kerja	
			Meningkatkan kesesuaian jenis pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja	
			Pengoptimalan kualitas pelatihan	
			Meningkatkan kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dengan dunia usaha dan industri dalam menyediakan data lowongan kerja terkini	
			Penguatan sistem verifikasi dan validasi informasi lowongan kerja yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi	
			Meningkatkan cakupan kepesertaan jamian sosial ketenagakerjaan	
			Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja dan pemberi kerja tentang pentingnya perlindungan sosial	
			Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bagian/unit kerja	
			Meningkatkan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kualitas pelayanan internal	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra PD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang 2025 - 2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Tenaga Kerja untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat pada table berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA							
Meningkatnya akses lapangan kerja	**Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas, Produktif dan Sejahtera**				**Persentase Pengangguran yang tertangani (%)**		**Kepala Dinas**
		Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan			**Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan (%)**		**Kepala Dinas**
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal		**Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan (%)**	**2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kabid Penempatan Tenaga Kerja**
				Meningkatnya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Pelayanan antar Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Penempatan Tenaga Kerja
				Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	Staf Subkoor Penempatan Tenaga Kerja
				Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Staf Subkoor Penempatan Tenaga Kerja
				Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Staf Subkoor Pemberdayaan Purna Kerja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Izin LPTKS yang diterbitkan	Jumlah Izin LPTKS yang diterbitkan (Izin)	2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Penempatan Tenaga Kerja
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	2.07.04.2.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Staf Subkoor Penempatan Tenaga Kerja
				Meningkatnya Kualitas Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Pemberdayaan Purna Kerja
				Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Staf Subkoor Pemberdayaan Purna Kerja
				Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Staf Subkoor Pemberdayaan Purna Kerja
				Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Staf Subkoor Pemberdayaan Purna Kerja
			Meningkatnya lowongan pekerjaan yang berkualitas		**Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas (%)**	**2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kabid Penempatan Tenaga Kerja**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Subkoor Informasi Pasar Kerja
				Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Staf Subkoor Informasi Pasar Kerja
				Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Staf Subkoor Informasi Pasar Kerja
				Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	Staf Subkoor Informasi Pasar Kerja
					Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru (%)		**Kepala Dinas**
			Meningkatnya wirausaha baru		**Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru (%)**	**2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kabid Penempatan Tenaga Kerja**
				Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Wirausaha Baru yang Berkualitas (Pelatihan)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Perluasan Kesempatan Kerja
				Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	Staf Subkoor Perluasan Kesempatan Kerja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas (%)		**Kepala Dinas**
			Meningkatnya keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri		**Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)**	**2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Kabid Penempatan Tenaga Kerja**
				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Subkoor Penempatan Tenaga Kerja
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Staf Subkoor Penempatan Tenaga Kerja
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Staf Subkoor Penempatan Tenaga Kerja
					Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja (%)		**Kepala Dinas**
			Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif		**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)**	**2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kabid Pelatihan Tenaga Kerja**
				Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kepala UPTD BLK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Staf UPTD BLK
				Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kasubag TU UPTD BLK
				Meningkatnya Kualitas Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Vokasi (%)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Subkoor Sertifikasi Kompetensi Pelatihan
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Staf Subkoor Sertifikasi Kompetensi Pelatihan dan
				Meningkatnya Kualitas Peserta Pelatihan dan Pemagangan	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemagangan (%)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Subkoor Pengembangan dan Analisa Kebutuhan Pelatihan
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Staf Subkoor Pengembangan dan Analisa Kebutuhan Pelatihan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi (%)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Subkoor Kelembagaan Pelatihan Kerja
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Staf Subkoor Kelembagaan Pelatihan Kerja
				Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Memiliki Izin (%)	2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Subkoor Kelembagaan Pelatihan Kerja
				Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Staf Subkoor Kelembagaan Pelatihan Kerja
					Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (%)		**Kepala Dinas**
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		**Persentase produktivitas tenaga kerja (%)**	**2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kabid Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja**
				Meningkatnya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Program Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Ketua Tim
				Terlaksananya Konsultasi	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi	2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi	Staf Pemantauan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	dan Pengukuran Produktivitas Kerja
				Meningkatnya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/orang)	2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Pemantauan dan Pengukuran Produktivitas Kerja
				Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Staf Subkoor Pemantauan dan Pengukuran Produktivitas Kerja
		Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial yang Kondusif dan Berkeadilan			**Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan (%)**		**Kepala Dinas**
			Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja		**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)**	**2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
				Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Staf Subkoor Syarat-syarat Kerja
				Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Staf Subkoor Syarat-syarat Kerja
				Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Staf Subkoor Syarat-syarat Kerja
				Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) (%)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Staf Subkoor Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
				Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Staf Subkoor Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
				Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Staf Subkoor Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Staf Subkoor Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
				Meningkatnya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (%)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
				Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Staf Subkoor Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja			**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)**		**Kepala Dinas**
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		**Kepala Dinas**
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja		**Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja (%)**	**2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sekretaris**
					Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan	**2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					keuangan Dinas Tenaga Kerja yang berkualitas (%)	**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Tersedianya acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja beserta Pelaporan Kinerja yang sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan (%)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoor Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan dan Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Staf Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan dan Evaluasi
				Terwujudnya tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan (%)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Keuangan dan BMD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Keuangan dan BMD
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Keuangan dan BMD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.07.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Keuangan dan BMD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Realisasi Anggaran			
				Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Berkualitas dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja	Nilai Layanan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja (Nilai)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.07.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras Kantor untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Pesentase Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja (%)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				n Bangunan Kantor			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Berbasis Elektronik pada SKPD			
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja (%)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang dan Persentase aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja yang selesai ditindaklanjuti (%)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja sesuai ketentuan (%)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian

Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja mendukung pencapaian program prioritas Kepala Daerah yaitu 1) Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry; 2) Menyediakan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (link and match); 3) Pengembangan program pelatihan kerja yang bersertifikat; 4) Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan baik untuk Tenaga Kerja Formal maupun Informal. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	Program Penempatan Kerja	(1) Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal	2.07.04.2.01 - Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.04.2.01.0002 - Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	
		(2) Meningkatnya wirausaha baru	2.07.04.2.01 - Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.04.2.01.0005 - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	
		(3) Meningkatnya lowongan pekerjaan yang berkualitas	2.07.04.2.03 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2.07.04.2.03.0002 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif	2.07.03.2.01 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.07.03.2.01.0001 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
3	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja	2.07.05.2.02 - Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.05.2.02.0005 - Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang terdapat pada lampiran table berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**21.906.315.604**		**24.345.625.572**		**25.407.326.814**		**25.602.346.245**		**26.062.356.697**	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**16.138.826.868**		**17.967.961.762**		**18.764.086.408**		**18.910.323.193**		**19.255.265.484**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja	**Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja (%)**	**67**	**67,5**	**16.138.826.868**	**68,5**	**17.967.961.762**	**69**	**18.764.086.408**	**69,5**	**18.910.323.193**	**70**	**19.255.265.484**	
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja yang berkualitas (%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				56.282.999		62.052.861		63.861.544		61.978.246		61.903.398	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja beserta Pelaporan Kinerja yang sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan (%)	100	100	56.282.999	100	62.052.861	100	63.861.544	100	61.978.246	100	61.903.398	
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				526.009		579.933		596.837		4.850.471		4.844.614	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3	526.009	3	579.933	3	596.837	3	4.850.471	3	4.844.614	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				526.009		579.933		596.837		538.941		538.290	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	526.009	1	579.933	1	596.837	1	538.941	1	538.290	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				526.009		579.933		596.837		538.941		538.290	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	526.009	1	579.933	1	596.837	1	538.941	1	538.290	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				526.009		579.933		596.837		538.941		538.290	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	526.009	1	579.933		596.837		538.941		538.290	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				526.009		579.933		596.837		538.941		538.290	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	526.009	1	579.933	1	596.837	1	538.941	1	538.290	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				526.009		579.933		596.837		538.941		538.290	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	2	526.009	2	579.933	2	596.837	2	538.941	2	538.290	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				53.126.945		58.573.263		60.280.522		54.433.070		54.367.334	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	53.126.945	1	58.573.263	1	60.280.522	1	54.433.070	1	54.367.334	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.564.293.866		13.193.802.957		13.842.682.633		14.608.802.826		15.318.071.310	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan (%)	100	100	12.564.293.866	100	13.193.802.957	100	13.842.682.633	100	14.608.802.826	100	15.318.071.310	
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.404.913.047		13.018.083.179		13.661.841.063		14.337.715.378		15.047.311.232	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	72	12.404.913.047	72	13.018.083.179	72	13.661.841.063	72	14.337.715.378	72	15.047.311.232	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				157.802.792		173.979.979		179.051.059		269.470.625		269.145.208	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	157.802.792	12	173.979.979	12	179.051.059	12	269.470.625	12	269.145.208	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				526.009		579.933		596.837		538.941		538.290	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	526.009	1	579.933	1	596.837	1	538.941	1	538.290	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				526.009		579.933		596.837		538.941		538.290	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	0	1	526.009	1	579.933	1	596.837	1	538.941	1	538.290	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				526.009		579.933		596.837		538.941		538.290	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	526.009	1	579.933	1	596.837	1	538.941	1	538.290	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				153.652.950		159.153.193		160.877.360		154.972.007		154.905.623	
Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Berkualitas dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja	Nilai Layanan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja (Nilai)	0	80	153.652.950	80,5	159.153.193	81	160.877.360	81,5	154.972.007	82	154.905.623	
2.07.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.052.019		1.159.867		1.193.674		1.077.882		1.076.581	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	1.052.019	1	1.159.867	1	1.193.674	1	1.077.882	1	1.076.581	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				152.600.931		157.993.326		159.683.686		153.894.125		153.829.042	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	72	152.600.931	72	157.993.326	72	159.683.686	72	153.894.125	72	153.829.042	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				563.334.403		843.374.597		1.102.289.669		1.016.079.153		1.014.852.123	
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras Kantor untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Pesentase Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja (%)	100	100	563.334.403	100	843.374.597	100	1.102.289.669	100	1.016.079.153	100	1.014.852.123	
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.040.372		23.197.330		23.873.475		53.894.125		53.829.042	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	12	21.040.372	12	23.197.330	12	23.873.475	12	53.894.125	12	53.829.042	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.520.186		11.598.665		11.936.737		10.778.825		10.765.808	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	10.520.186	1	11.598.665	1	11.936.737	1	10.778.825	1	10.765.808	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.040.372		23.197.330		35.098.111		55.685.848		55.618.601	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	12	21.040.372	12	23.197.330	12	35.098.111	12	55.685.848	12	55.618.601	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.902.735		28.382.175		35.950.385		54.972.007		54.905.622	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	12	29.902.735	12	28.382.175	12	35.950.385	12	54.972.007	12	54.905.622	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.780.279		23.197.330		23.873.475		53.894.125		53.829.042	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	10	15.780.279	10	23.197.330	10	23.873.475	10	53.894.125	10	53.829.042	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.260.093		5.799.333		5.968.369		5.389.412		5.382.904	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	24	5.260.093	24	5.799.333	24	5.968.369	24	5.389.412	24	5.382.904	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.364.130		8.119.066		8.355.716		26.947.062		26.914.521	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	200	12	7.364.130	12	8.119.066	12	8.355.716	12	26.947.062	12	26.914.521	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				231.502.327		344.983.315		449.209.216		323.364.750		322.974.250	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	120	231.502.327	120	344.983.315	120	449.209.216	120	323.364.750	120	322.974.250	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.520.186		11.598.665		11.936.737		53.894.125		53.829.042	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	1	10.520.186	1	11.598.665	1	11.936.737	1	53.894.125	1	53.829.042	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				210.403.723		363.301.388		496.087.448		377.258.874		376.803.291	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	1	210.403.723	1	363.301.388	1	496.087.448	1	377.258.874	1	376.803.291	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				880.615.534		842.570.269		549.209.216		664.590.013		333.740.058	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja (%)	100	100	880.615.534	100	842.570.269	100	549.209.216	100	664.590.013	100	333.740.058	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				521.277.536		0		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	521.277.536	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				322.517.347		355.580.280		0		330.446.438		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	3	322.517.347	3	355.580.280	0	0	3	330.446.438	0	0	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.520.186		211.598.665		211.936.737		10.778.825		10.765.808	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	23	5	10.520.186	5	211.598.665	5	211.936.737	5	10.778.825	5	10.765.808	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.300.465		275.391.324		337.272.479		323.364.750		322.974.250	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	26.300.465	5	275.391.324	10	337.272.479	15	323.364.750	15	322.974.250	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.321.392.853		1.831.275.290		1.892.092.160		1.449.974.938		1.419.018.936	
Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang dan Persentase aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja yang selesai ditindaklanjuti (%)	100	100	1.321.392.853	100	1.831.275.290	100	1.892.092.160	100	1.449.974.938	100	1.419.018.936	
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				341.906.050		605.953.283		617.785.805		472.092.440		442.438.104	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1	341.906.050	1	605.953.283	1	617.785.805	1	472.092.440	1	442.438.104	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				979.486.803		1.225.322.007		1.274.306.355		977.882.498		976.580.832	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	979.486.803	1	1.225.322.007	1	1.274.306.355	1	977.882.498	1	976.580.832	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				599.254.263		1.035.732.595		1.153.073.826		953.926.010		952.774.036	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja sesuai ketentuan (%)	100	100	599.254.263	100	1.035.732.595	100	1.153.073.826	100	953.926.010	100	952.774.036	
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				47.340.838		52.193.994		53.715.318		80.841.187		80.743.562	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	47.340.838	1	52.193.994	1	53.715.318	1	80.841.187	1	80.743.562	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				326.125.771		359.558.622		370.038.856		485.047.124		484.461.374	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	326.125.771	24	359.558.622	24	370.038.856	24	485.047.124	24	484.461.374	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.585.792		200.000.000		200.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	63	63	70.585.792	63	200.000.000	63	200.000.000	63	50.000.000	63	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				155.201.862		423.979.979		529.319.652		338.037.699		337.569.100	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	155.201.862	3	423.979.979	3	529.319.652	3	338.037.699	3	337.569.100	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				**46.963.727**		**51.932.283**		**54.094.831**		**54.492.060**		**55.429.041**	
Meningkatnya keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri	**Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)**	**80,95**	**90**	**46.963.727**	**90**	**51.932.283**	**90**	**54.094.831**	**90**	**54.492.060**	**90**	**55.429.041**	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				46.963.727		51.932.283		54.094.831		54.492.060		55.429.041	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	46.963.727	0	51.932.283	0	54.094.831	1	54.492.060	0	55.429.041	
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				30.355.904		0		0		43.177.521		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	30.355.904	0	0	0	0	1	43.177.521	0	0	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				16.607.823		51.932.283		54.094.831		11.314.539		55.429.041	
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	30	16.607.823	30	51.932.283	30	54.094.831	30	11.314.539	30	55.429.041	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				**3.469.728.705**		**3.836.810.822**		**3.996.582.045**		**4.025.929.749**		**4.095.154.904**	
Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)**	**79,06**	**80**	**3.349.444.776**	**81**	**3.693.610.617**	**81,5**	**3.837.765.087**	**82**	**3.857.703.083**	**82,5**	**3.924.035.610**	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				3.071.866.480		3.373.796.826		3.492.104.648		3.499.114.663		3.559.281.324	
Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)	79.6	80	2.553.720.327	80	2.701.710.531	80	2.699.888.291	80	2.620.794.383	80	2.665.858.482	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.461.194.228		2.606.243.728		2.606.466.551		2.532.254.032		2.575.795.695	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	720	725	2.461.194.228	764	2.606.243.728	762	2.606.466.551	737	2.532.254.032	749	2.575.795.695	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				92.526.099		95.466.803		93.421.740		88.540.351		90.062.787	
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	23	28	92.526.099	29	95.466.803	28	93.421.740	27	88.540.351	27	90.062.787	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Vokasi (%)	0	100	259.073.076,50	100	336.043.147,50	100	396.108.178,50	100	439.160.140	100	446.711.421	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				259.073.076,50		336.043.147,50		396.108.178,50		439.160.140		446.711.421	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	86	259.073.076,50	106	336.043.147,50	119	396.108.178,50	126	439.160.140	128	446.711.421	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Peserta Pelatihan dan Pemagangan	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemagangan (%)	0	100	259.073.076,50	100	336.043.147,50	100	396.108.178,50	100	439.160.140	100	446.711.421	
2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				259.073.076,50		336.043.147,50		396.108.178,50		439.160.140		446.711.421	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	16	259.073.076,50	16	336.043.147,50	16	396.108.178,50	16	439.160.140	16	446.711.421	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				231.315.247		262.533.709		280.265.221		287.756.139		292.704.057	
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi (%)	25,45	29	231.315.247	30	262.533.709	31	280.265.221	32	287.756.139	33	292.704.057	
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				231.315.247		262.533.709		280.265.221		287.756.139		292.704.057	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	20	28	231.315.247	33	262.533.709	37	280.265.221	40	287.756.139	41	292.704.057	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				46.263.049		57.280.082		65.395.218		70.832.281		72.050.229	
Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Memiliki Izin (%)	100	100	46.263.049	100	57.280.082	100	65.395.218	100	70.832.281	100	72.050.229	
2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				46.263.049		57.280.082		65.395.218		70.832.281		72.050.229	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	15	32	46.263.049	38	57.280.082	42	65.395.218	44	70.832.281	45	72.050.229	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	**Persentase produktivitas tenaga kerja (%)**	**100**	**100**	**120.283.929**	**100**	**143.200.205**	**100**	**158.816.958**	**100**	**168.226.666**	**100**	**171.119.294**	
2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				27.757.830		28.640.041		28.026.522		26.562.105		27.018.836	
Meningkatnya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Program Produktivitas (Perusahaan)	0	55	27.757.830	60	28.640.041	65	28.026.522	70	26.562.105	75	27.018.836	
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				27.757.830		28.640.041		28.026.522		26.562.105		27.018.836	
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0	56	27.757.830	57	28.640.041	56	28.026.522	53	26.562.105	54	27.018.836	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				92.526.099		114.560.164		130.790.436		141.664.561		144.100.458	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/orang)	181.547.565	192.603.812	92.526.099	198.381.926	114.560.164	204.333.384	130.790.436	210.463.385	141.664.561	216.777.287	144.100.458	
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				92.526.099		114.560.164		130.790.436		141.664.561		144.100.458	
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	33	7	92.526.099	10	114.560.164	11	130.790.436	12	141.664.561	13	144.100.458	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				**1.314.057.709**		**1.453.079.265**		**1.513.587.918**		**1.524.702.497**		**1.550.919.489**	
Meningkatnya lowongan pekerjaan yang berkualitas	**Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas (%)**	**76**	**78**	**467.701.859**	**79**	**513.670.393**	**80**	**488.065.131**	**81**	**489.968.887**	**82**	**498.393.816**	
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				467.701.859		513.670.393		488.065.131		489.968.887		498.393.816	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja (Orang)	3.589	3.700	467.701.859	3.800	513.670.393	3.900	488.065.131	4.000	489.968.887	4.100	498.393.816	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				40.111.652		44.054.065		41.858.073		42.021.345		42.743.895	
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	0	1	40.111.652	1	44.054.065	1	41.858.073	1	42.021.345	1	42.743.895	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				186.920.297		205.291.941		195.058.620		195.819.470		199.186.551	
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.809	2.006	186.920.297	2.203	205.291.941	2.093	195.058.620	2.101	195.819.470	2.137	199.186.551	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				240.669.910		264.324.387		251.148.438		252.128.072		256.463.370	
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	862	802	240.669.910	881	264.324.387	837	251.148.438	840	252.128.072	855	256.463.370	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal	**Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan (%)**	**72**	**73**	**365.016.030**	**75**	**410.760.097**	**76**	**439.509.766**	**77**	**446.434.775**	**78**	**454.111.142**	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				212.591.753		243.354.652		280.449.089		286.753.663		291.684.341	
Meningkatnya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja (Orang)	3.138	3.370	212.591.753	3.400	243.354.652	3.450	280.449.089	3.500	286.753.663	3.550	291.684.341	
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				140.390.781		155.246.523		188.361.328		190.104.567		193.373.381	
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	3.138	3.370	140.390.781	3.400	155.246.523	3.450	188.361.328	3.500	190.104.567	3.550	193.373.381	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				24.066.991		26.432.439		25.114.844		25.212.807		25.646.337	
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	30	48	24.066.991	50	26.432.439	50	25.114.844	50	25.212.807	50	25.646.337	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				48.133.981		61.675.690		66.972.917		71.436.289		72.664.623	
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	30	14	48.133.981	17	61.675.690	17	66.972.917	18	71.436.289	19	72.664.623	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				16.044.661		17.621.626		16.743.229		16.808.538		17.097.558	
Meningkatnya Izin LPTKS yang diterbitkan	Jumlah Izin LPTKS yang diterbitkan (Izin)	0	1	16.044.661	1	17.621.626	1	16.743.229	1	16.808.538	1	17.097.558	
2.07.04.2.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				16.044.661		17.621.626		16.743.229		16.808.538		17.097.558	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	0	6	16.044.661	6	17.621.626	6	16.743.229	6	16.808.538	6	17.097.558	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				136.379.616		149.783.819		142.317.448		142.872.574		145.329.243	
Meningkatnya Kualitas Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) (Orang)	15	20	136.379.616	20	149.783.819	20	142.317.448	20	142.872.574	20	145.329.243	
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				72.200.973		79.297.316		75.344.531		75.638.422		76.939.011	
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	16	72.200.973	18	79.297.316	17	75.344.531	17	75.638.422	17	76.939.011	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				16.044.661		17.621.626		16.743.229		16.808.538		17.097.558	
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0	160	16.044.661	176	17.621.626	167	16.743.229	168	16.808.538	171	17.097.558	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				48.133.982		52.864.877		50.229.688		50.425.614		51.292.674	
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	15	12	48.133.982	13	52.864.877	13	50.229.688	13	50.425.614	13	51.292.674	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya wirausaha baru	**Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru (%)**	**66**	**70**	**481.339.820**	**72**	**528.648.775**	**74**	**586.013.021**	**76**	**588.298.835**	**78**	**598.414.531**	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				481.339.820		528.648.775		586.013.021		588.298.835		598.414.531	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Wirausaha Baru yang Berkualitas (Pelatihan)	4	4	481.339.820	4	528.648.775	4	586.013.021	4	588.298.835	4	598.414.531	
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				481.339.820		528.648.775		586.013.021		588.298.835		598.414.531	
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	44	80	481.339.820	88	528.648.775	105	586.013.021	105	588.298.835	107	598.414.531	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				**936.738.595**		**1.035.841.440**		**1.078.975.612**		**1.086.898.746**		**1.105.587.779**	
Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)**	**89**	**89,3**	**936.738.595**	**89,4**	**1.035.841.440**	**89,5**	**1.078.975.612**	**89,6**	**1.086.898.746**	**89,7**	**1.105.587.779**	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				121.417.128		124.663.705		126.354.865		122.439.140		124.544.459	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Perusahaan)	892	900	121.417.128	905	124.663.705	910	126.354.865	915	122.439.140	920	124.544.459	
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				15.902.607		16.641.032		17.871.975		18.449.733		18.766.973	
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	164	18	15.902.607	18	16.641.032	20	17.871.975	20	18.449.733	20	18.766.973	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				3.180.865		3.328.206		4.825.433		6.708.994		6.824.354	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	0	4	3.180.865	4	3.328.206	5	4.825.433	7	6.708.994	7	6.824.354	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				102.333.656		104.694.467		103.657.457		97.280.413		98.953.132	
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	4	1	102.333.656	1	104.694.467	1	103.657.457	1	97.280.413	1	98.953.132	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				815.321.467		911.177.735		952.620.747		964.459.606		981.043.320	
Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) (%)	70,63	70,87	218.909.358	77,99	227.046.408	71,11	219.869.753	71,23	209.697.781	71,35	213.303.498	
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				26.983.312		29.584.057		28.595.161		28.513.224		29.003.504	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	163	36	26.983.312	39	29.584.057	38	28.595.161	37	28.513.224	38	29.003.504	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.760.235		11.094.022		10.723.185		11.740.739		11.942.619	
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	83	18	9.760.235	20	11.094.022	20	10.723.185	20	11.740.739	20	11.942.619	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				15.848.388		16.214.006		16.084.778		15.095.236		15.354.796	
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	10	7	15.848.388	7	16.214.006	6	16.084.778	6	15.095.236	6	15.354.796	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				166.317.423		170.154.323		164.466.629		154.348.582		157.002.579	
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	166.317.423	1	170.154.323	1	164.466.629	1	154.348.582	1	157.002.579	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (%)	100	100	596.412.109	100	684.131.327	100	732.750.994	100	754.761.825	100	767.739.822	
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				596.412.109		684.131.327		732.750.994		754.761.825		767.739.822	
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0	2.000	596.412.109	2.300	684.131.327	2.463	732.750.994	2.575	754.761.825	2.644	767.739.822	Dinas Tenaga Kerja

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

No.	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	5.141.230.800	5.510.500.000	5.896.235.000	6.308.971.450	6.750.599.451	7.223.141.413	-

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pengangguran yang tertangani	%	11	12	12,5	13	13,5	-
2	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan	%	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
3	Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru	%	2	2	2	2	2	
4	Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas	%	1	1	1	1	1	
5	Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja	%	38,5	40	41,5	43	44,5	
6	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	3	3	3	3	3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan	%	70,87	70,99	71,11	71,23	71,35	

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang ketenagakerjaan, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja untuk kurun waktu perencanaan tahun 2025 hingga 2029. Indikator ini menjadi instrumen utama dalam mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan adalah "1. Persentase Pengangguran yang Tertangani; 2. Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan; 3. Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru; 4. Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas; 5. Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja; 6. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; 7. Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan.", yang mencerminkan tingkat efektivitas intervensi program ketenagakerjaan dalam menurunkan angka pengangguran secara bertahap. Target tahunan untuk indikator ini telah disusun secara progresif, dengan harapan mampu menjawab tantangan dinamika ketenagakerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Semarang.

Peningkatan target dari tahun ke tahun mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses kesempatan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, serta memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan industri. Dengan pencapaian target tersebut, diharapkan tingkat pengangguran di Kota Semarang dapat ditangani secara lebih optimal, sekaligus menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta mewujudkan tujuan strategis pembangunan bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja menetapkan serangkaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung mencerminkan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. IKK ini disusun untuk memantau dan mengendalikan hasil dari intervensi pemerintah daerah selama periode 2025–2029 yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja
Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90	90	90	90	90	
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	70,87	70,99	71,11	71,23	71,35	
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	80,5	81	81,5	82	82,5	
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	56,83	58,34	59,85	61,36	62,87	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,24	61,84	62,44	63,23	63,88	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan bidang tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Tenaga Kerja ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/ kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan ketenagakerjaan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Tenaga Kerja sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan ketenagakerjaan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 2029;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mempunyai fungsi:

1) perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5) penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
6) penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7) penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
8) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
9) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

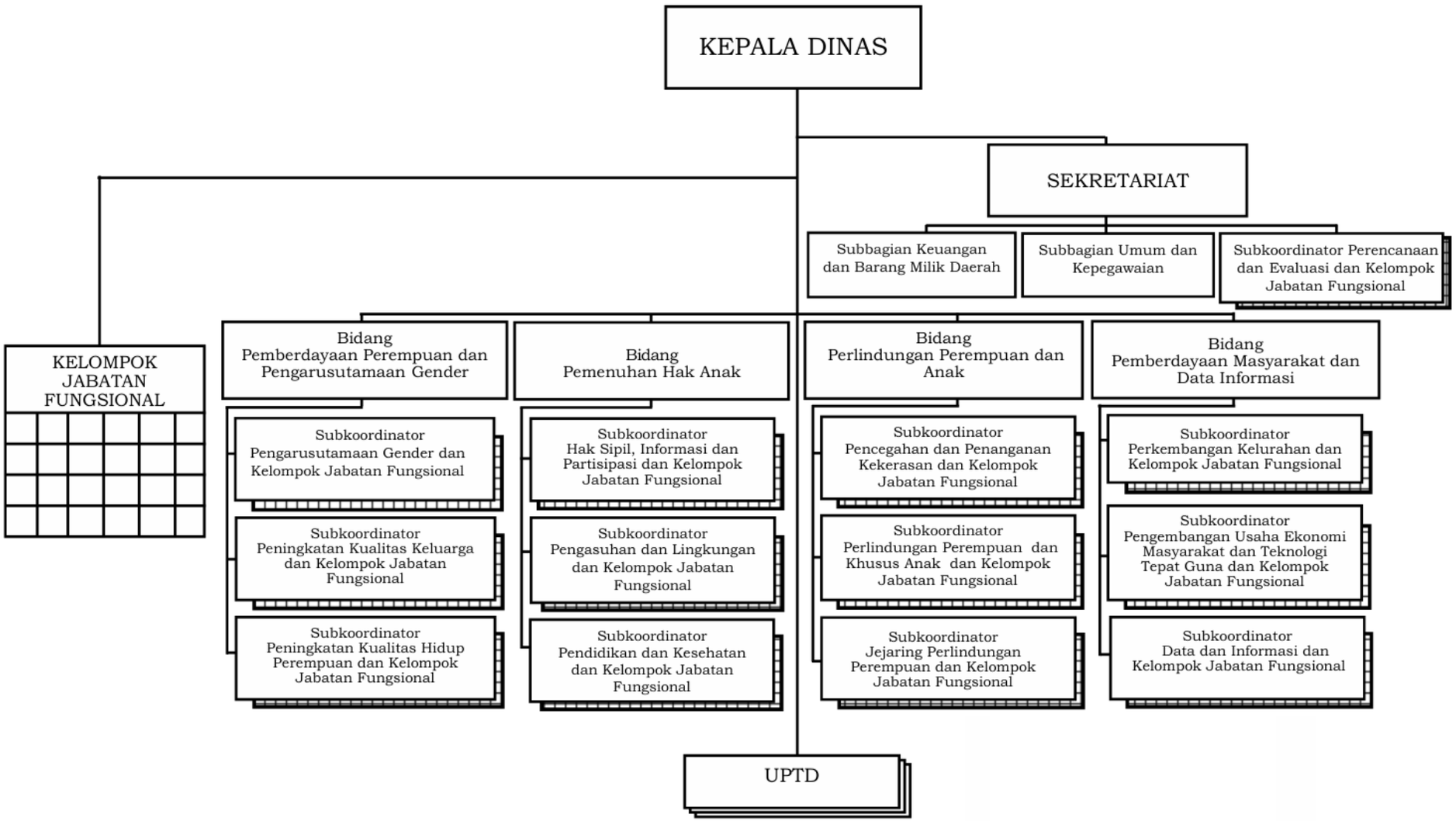

GAMBAR 2.2
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)

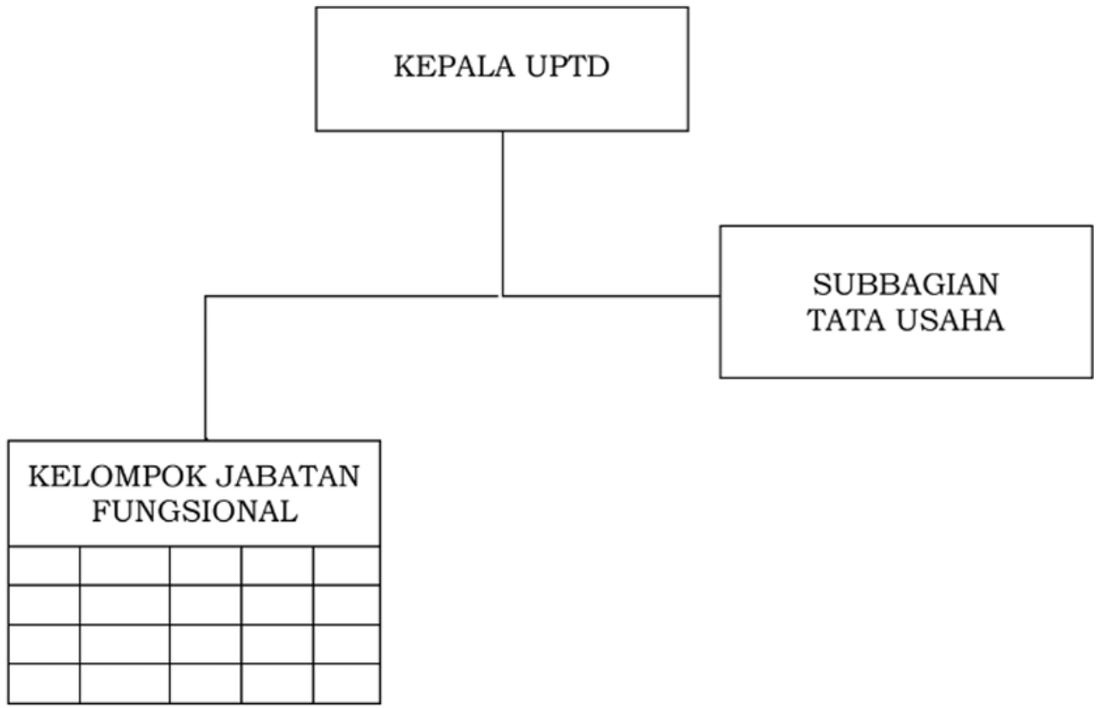

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

2. Sekretaris

   Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD. Sekretaris diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
   Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:
   a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab;
   c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
   d. pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
   e. pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait;
   f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Kesekretariatan Dinas;
   g. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD;
   h. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
   i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;

j. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerinta Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;

k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;

l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;

m. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;

n. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;

o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;

p. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;

q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;

r. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;

s. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;

t. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;

u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

v. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;

w. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;

x. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;

y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

z. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
e. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan, sosialisasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
f. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi lembaga berbasis gender antara lain Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita Persatuan, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia dan organisasi perempuan lainnya;
h. pelaksanaan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
i. pelaksanaan kegiatan pengukuran ketahanan keluarga;
j. pelaksanaan kegiatan peringatan terkait peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
k. pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan perempuan;
l. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyedia layanan komprehensif pemberdayaan perempuan;
m. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan, dan Pendidikan dan Kesehatan. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
e. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi;
f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum anak;
g. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan bagi anak, antara lain anak penyandang disabilitas, psikososial, perlakuan salah, perilaku menyimpang dan kelompok minoritas;
h. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pendidikan, budaya, kreativitas dan kesehatan;
i. pelaksanaan kegiatan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan dan Pendidikan dan Kesehatan;
j. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemenuhan Hak Anak;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Kepala Bidang diberi tugas

tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
e. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga;
f. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan dan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
g. pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan antara lain dalam ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang;
h. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain dari kekerasan, radikalisme, pornografi, eksploitasi, dalam situasi darurat Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya, Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome, perlakuan salah dan penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang;
i. pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak; pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga lain;
j. pelaksanaan kegiatan kerja sama layanan rujukan dengan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
k. pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Perlindungan Perempuan dan Anak;
n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Data Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan;
f. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat;
i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan; pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana Perkembangan Kelurahan;
j. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
l. pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan antara lain melalui TNI Manunggal Membangun Desa, Karya Bakti Gugur Gunung;
m. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan profil kelurahan, profil anak dan profil gender;
n. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, swadaya masyarakat serta gender dan anak;
o. pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
p. pelaksanaan kegiatan Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi;
q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;

r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;

s. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;

t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;

u. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Daerah. Tugas UPTD PPA meliputi:

a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;

b. memberikan informasi tentang Hak Korban;

c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;

d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;

f. menyediakan layanan hukum;

g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;

h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;

i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;

j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan

k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;

b. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

d. pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban;

e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD PPA;

f. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD PPA;

g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD PPA;

h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan/sub kegiatan; dan mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;

i. menyusun program kerja UPTD PPA;

j. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

k. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

l. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;

m. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan

n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam data kepegawaian per bulan Agustus tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Tenaga Alih Daya		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD					
2	SMP/Sederajat	1	-	-	-	1
3	SMA/Sederajat	6	5	-	2	13
4	Diploma 3/D3	4	3	-	-	7
5	Strata 1/S1	9	31	-	3	43
6	Strata 2/S2	7	7	-	1	15
TOTAL		27	46	-	6	79

Dari jumlah pegawai sebanyak 79 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN		6	6
2	Golongan II	3	3	6
3	Golongan III	10	22	32
4	Golongan IV	3	4	7
5	Golongan V	4	3	7
6	Golongan VII	2	-	2
7	Golongan IX	4	14	18

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset Tanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1835	2006	Jl. Prof Sudarto, SH No. 70 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Hak Pakai	18 Mei 2006	HP 9	Rumdin Ketua DPRD	Pembelian	5.326.900

Tabel 2.4
Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	180	Jl. Prof Sudarto, SH No. 70 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	59.243.530

Tabel 2.5
Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
1	Meja ½ Biro	000004				1993	Pembelian	305,02
2	Rice Warmer	000001	Indesit			2003	Pembelian	5.000
3	Tabung Gas	000002-000004	Elpiji			2003	Pembelian	1.500
4	Meja ½ Biro	000008				2005	Pembelian	1.735,18
5	Lemari Es	000006				2007	Pembelian	8.250
6	Lemari Kayu	000002-000005				2008	Pembelian	39.160
7	Pompa Lainnya (dst)	000001	Sanyo	Buah		2009	Pembelian	1.080
8	Alat Pengolahan Lainnya	000001-000002				2009	Pembelian	1.925,12
9	Alat Reproduksi Lainnya	000001				2009	Pembelian	2.550
10	Lemari Besi/Metal	000001-000005	Hexo			2009	Pembelian	3.892,81
11	Filling Cabinet Besi	000001-000004	Brother			2009	Pembelian	3.587,96
12	Filling Cabinet Besi	000005	Daito			2009	Pembelian	3.000,31
13	Meja Kerja Kayu	000005				2009	Pembelian	3.064,58
14	Kursi Kayu	000004				2009	Pembelian	612
15	Meja Rapat	000001				2009	Pembelian	3.279,75
16	Meja Ketik	000001				2009	Pembelian	1.334,69
17	Lemari Es	000001	Panasonic			2009	Pembelian	2.295
18	Tabung Gas	000005		50 kg		2009	Pembelian	1.272
19	Meja Rapat Pejabat Lainnya	000001				2009	Pembelian	962,56
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000002-000001				2009	Pembelian	4.326,65
21	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	000001-000008				2009	Pembelian	3.127,30

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
22	Wireless Amplifier	000001				2009	Pembelian	971,10
23	PC Unit	000002	Acer			2009	Pembelian	9.913,24
24	Laptop	000001	Sony			2009	Pembelian	23.430
25	Laptop	000003	Ebonit			2009	Pembelian	10.228,65
26	Televisi	000012	LG	32”		2010	Pembelian	9.547,85
27	Kursi Tamu	000001	Sofa			2010	Pembelian	4.924,68
28	Laptop	000004	Toshiba L510			2010	Pembelian	11.100
29	Laptop	000006	Toshiba M900			2010	Pembelian	14.900
30	Komputer Unit Lainnya	000001	Sony-Vplex 70			2010	Pembelian	10.400
31	LCD Projector/Infocus	000001	Epson			2011	Pembelian	17.548,81
32	Sepeda Motor	000008-000009	Honda	110	Campuran	2012	Pembelian	13.780,18
33	Kursi Besi/Metal	000023-000024	Silver 3 Deret	680mm		2012	Pembelian	3.800
34	Kursi Putar	000004-000001	Atlanta			2012	Pembelian	6.559,46
35	Handy Cam	000002	Sony			2012	Pembelian	7.475
36	Digital Video Effect	000001	Canon EDS 1100			2012	Pembelian	4.770
37	Wireless Ampifier	000002	GTCO			2012	Pembelian	5.092,82
38	Meja Kerja	000007	Kitchen Zink			2012	Pembelian	1.715
39	PC Unit	000003	Rellion			2012	Pembelian	6.345,62
40	Laptop	000007	Toshiba L745			2012	Pembelian	10.249,15
41	Laptop	000008	Toshiba M840			2012	Pembelian	9.700
42	Lemari Kaca	000001	Brother			2013	Pembelian	3.975
43	Kursi Rapat	000002-000001				2013	Pembelian	1.670,24
44	AC Window	000001-000005	LG	2 PK		2013	Pembelian	31.680
45	Laptop	000001	Sony/Inove			2013	Pembelian	7.700
46	Station Wagon	000001	Toyota Innova	2500cc	Campuran	2014	Pembelian	125.000
47	KBM Penumpang Lainnya	000001	Toyota Avanza Veloz	1495cc		2014	Pembelian	196.990

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
48	Filling Cabinet Besi	000006-000008	Hexo			2014	Pembelian	2.400
49	Tempat Tidur Besi	000002-000004	Model No.2	180x120		2014	Pembelian	11.697,38
50	Meja Makan Besi	000001				2014	Pembelian	7.275
51	Sofa	000007				2014	Pembelian	6.250
52	Meubeleur Lainnya	000012-000014	Estima	180x200		2014	Pembelian	41.982,38
53	Meubeleur Lainnya	000015-000020	Selera	180x90		2014	Pembelian	3.525,24
54	AC Window	000006-000007	LG	2 PK		2014	Pembelian	9.370,23
55	AC Split	000001	Sharp	1 ½ PK		2014	Pembelian	4.732,38
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000002-000003				2014	Pembelian	2.568
57	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000003-000002	Tiger Kuning			2014	Pembelian	4.236,69
58	Camera Vertical	000001	Nikon			2014	Pembelian	9.967,01
59	Laptop	000010	Toshiba Satelite			2014	Pembelian	8.251
60	Water Treatment	000001-000003				2015	Pembelian	13.591,73
61	KBM Penumpang Lainnya	000002	Toyota Avanza Veloz	1329cc	Campuran	2015	Pembelian	197.810
62	Sepeda Motor	000010	Honda			2015	Pembelian	14.126
63	Kursi Besi/Metal	000019-000022				2015	Pembelian	7.907,59
64	Tempat Tidur Kayu	000001				2015	Pembelian	12,485,67
65	Sofa	000008-000009	Set 321			2015	Pembelian	25.491,57
66	Layar Film/Projector	000001	Epson			2015	Pembelian	5.900
67	Camera Digital	000001	Canon			2015	Pembelian	6.800
68	Notebook	000002	Asus			2015	Pembelian	7.700
69	Mobil Workshop	000001	Toyota	1781cc		2016	Pembelian	95.000

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
70	Sepeda Motor	000011-000012	Honda New Vario 125 CBS	125cc	Campuran	2016	Pembelian	17.094
71	Mobil Ambulance	000001	Daihatsu Luxio	1495cc		2016	Pembelian	226.150
72	LCD Projector/Infocus	000002	Lenovo			2016	Pembelian	2.000
73	AC Split	000013-000011	Daikin	2 PK		2016	Pembelian	49.419,75
74	AC Split	000015	Standing Floor	4 PK		2016	Pembelian	28.460
75	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001				2016	Pembelian	5.538,23
76	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000032	Brother			2016	Pembelian	1.975
77	Facsimile	000001	Panasonic			2016	Pembelian	2.900
78	Genset	000001	Perkins	30 Kva		2016	Pembelian	163.550,57
79	PC Unit	000004	Lenovo			2016	Pembelian	6.000
80	Laptop	000011	Toshiba			2016	Pembelian	8.500
81	Printer	000003-000007	Epson L220			2016	Pembelian	9.438
82	Station Wagon	000002	Toyota Allnew Kijang Innova	2500cc	Solar	2017	Pembelian	386.647,02
83	Minibus	000002-000003	Toyota Rush	1498cc	Campuran	2017	Pembelian	248.563,02
84	Sepeda Motor	000013-000014	Honda Vario	125cc	Campuran	2017	Pembelian	18.921
85	Sepeda Motor	000015-000026	Honda AFX12U21C08		Campuran	2017	Pembelian	17.152
86	Lemari Besi/Metal	000006-000007				2017	Pembelian	10.454,11
87	Filling Cabinet Besi	000010-000009	Superior		Besi	2017	Pembelian	12.967,12
88	Filling Cabinet Besi	000012-000016	Lufo		Besi	2017	Pembelian	9.619,79
89	Alat Penyimpan Kantor Lainnya	000001	Datafile		Besi	2017	Pembelian	31.513,11
90	Papan Nama Instansi	000003				2017	Pembelian	20.454,87

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
91	Meja Rapat	000002-000004		80cm	Kayu	2017	Pembelian	20.033,39
92	Tempat Tidur Besi	000001	Anak		Kayu	2017	Pembelian	3.015,61
93	Kursi Tamu	000003-000001	Sofa			2017	Pembelian	18.089,63
94	Kursi Tamu	000002				2017	Pembelian	7.363,11
95	Kursi Biasa	000002-000001	Konseling			2017	Pembelian	1.256,50
96	Meubeleur Lainnya	000009-000011	Konseling			2017	Pembelian	3.819,77
97	Meubeleur Lainnya	000010				2017	Pembelian	7.488,76
98	AC Split	000016-000020	Panasonic	1 PK	Campuran	2017	Pembelian	9.046,83
99	AC Split	000017-000019	Panasonic	2 PK	Campuran	2017	Pembelian	14.474,92
100	AC Split	000018	Panasonic	1 PK	Campuran	2017	Pembelian	4.523,41
101	Televisi	000002	Samsung LED	32”		2017	Pembelian	3.769,51
102	Televisi	000005-000003	Samsung Smart TV LED	49”		2017	Pembelian	34.679,50
103	Camera Film	000002	Sony			2017	Pembelian	13.670,36
104	Camera Film	000003	Nikon			2017	Pembelian	12.464,52
105	Handy Cam	000003	Panasonic			2017	Pembelian	14.927,26
106	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000002		Kayu		2017	Pembelian	6.966,06
107	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001				2017	Pembelian	4.997,87
108	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000004-000003				2017	Pembelian	6.966,06
109	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000006-000010				2017	Pembelian	24.060,56
110	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000055-000054		Kayu		2017	Pembelian	3.015,61
111	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000001-000004				2017	Pembelian	4.002,17

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
112	Facsimile	000002	Panasonic		Fiber	2017	Pembelian	1.407,28
113	Mainframe (Komputer Jaringan)	000001	Server		Campuran	2017	Pembelian	67.851,19
114	PC Unit	000005	Lenovo			2017	Pembelian	5.034,38
115	PC Unit	000008	HP Slimline			2017	Pembelian	13.067,38
116	Laptop	000017-000021	Asus			2017	Pembelian	40.658,44
117	Laptop	000018-000016	Dell Inspiron			2017	Pembelian	44.932,57
118	Laptop	000019-000020	Dell Inspiron			2017	Pembelian	30.135,67
119	Printer	000008	Epson L386			2017	Pembelian	3.015,61
120	Printer	000009	Epson L385			2017	Pembelian	3.015,61
121	Printer	000011	Epson L360			2017	Pembelian	2.311,97
122	Printer	000012-000013	Epson L380			2017	Pembelian	8.413,55
123	Sofa	000001			Multiplex	2018	Pembelian	7.100
124	Sofa	000002			Campuran	2018	Pembelian	7.500
125	Kitchen Set	000002			Multiplex	2018	Pembelian	16.450
126	Televisi	000006	Panasonic			2018	Pembelian	1.550
127	Televisi	000007	Samsung	32”		2018	Pembelian	4.335
128	Loudspeaker	000001	JBL			2018	Pembelian	19.950
129	Dispenser	000003	Arista			2018	Pembelian	1.100
130	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001				2018	Pembelian	1.375
131	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000056-000057				2018	Pembelian	4.200
132	PC Unit	000009-000010	Asus			2018	Pembelian	24.150
133	Laptop	000023-000027	Dell			2018	Pembelian	72.280
134	Printer	000016	Epson			2018	Pembelian	3.600
135	Printer	000019-000018	Brother			2018	Pembelian	7.582

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
136	Lemari Es	000003	Sharp			2019	Pembelian	3.000
137	Televisi	000008	Samsung	43”		2019	Pembelian	6.334,80
138	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000063-000062	Hexo		Campuran	2019	Pembelian	6.664
139	PC Unit	000013-000014	HP			2019	Pembelian	28.027,80
140	Laptop	000031	Asus A507U			2019	Pembelian	7.941,80
141	Laptop	000032-000031	Asus Vivobook			2019	Pembelian	13.017
142	Laptop	000041	Dell Inspiron			2019	Pembelian	11.841,66
143	PC	000001	Lenovo			2020	Pembelian	14.800
144	Laptop	000033	Lenovo	14”		2020	Pembelian	6.702,80
145	Laptop	000034	Dell			2020	Pembelian	8.200
146	Notebook	000020-000022	Samsung Tablet Galaxy			2020	Pembelian	47.920
147	Printer	000021-000024	Canon			2020	Pembelian	13.150
148	Printer	000025	Canon Inkjet			2020	Pembelian	1.289,62
149	Filling Cabinet Besi	000018-000017			Besi dan Kaca	2021	Pembelian	7.000
150	LCD Projector/Infocus	000004	Epson			2021	Pembelian	7.330
151	Kursi Lipat	000011-000007	Chitose		Campuran	2021	Pembelian	15.000
152	Mesin Cuci	000001	LG	10,5 kg		2021	Pembelian	12.200
153	AC Split	000021	Panasonic	2 PK		2021	Pembelian	8.750
154	Audio Mixing Portable	000001	Mipro			2021	Pembelian	22.175
155	Handy Talkie	000001	Baofeng			2021	Pembelian	421,76
156	PC Unit	000015-000016	Dell			2021	Pembelian	48.800
157	Laptop	000035-000036	Dell			2021	Pembelian	34.120

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
158	Printer	000028-000026	Epson L3110			2021	Pembelian	11.300
159	CCTV	000002	Dahua			2022	Pembelian	4.399,28
160	LCD Projector/Infocus	000005	Epson			2022	Pembelian	10.631,57
161	Focusing Screen/Layar LCD Projector	000001-000002				2022	Pembelian	16.150
162	Kursi Besi/Metal	000003-000008	Elkana			2022	Pembelian	10.700,89
163	Meja ½ Biro	000016-000018				2022	Pembelian	3.876,12
164	Loudspeaker	000002	Aubern			2022	Pembelian	6.022,72
165	Camera Video	000001	Logitech Conference			2022	Pembelian	3.821,40
166	Camera Video	000002	Logitech			2022	Pembelian	413,58
167	Dispenser	000004	Sharp			2022	Pembelian	2.566,32
168	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000001				2022	Pembelian	3.894,69
169	Camera Electronic	000002-000001	Sony/Alpha			2022	Pembelian	71.603
170	Switcher	000001				2022	Pembelian	28.356,20
171	PC Unit	000017-000019	Asus			2022	Pembelian	43.121
172	Laptop	000037-000038	HP			2022	Pembelian	20.874,02
173	Notebook	000024	Asus			2022	Pembelian	10.200
174	Scanner	000002-000001	Epson			2022	Pembelian	10.502
175	Monitor	000001	LG			2022	Pembelian	1.150
176	Printer	000031-000032	Canon			2022	Pembelian	11.933
177	Tenda	000009-000013			Campuran	2022	Pembelian	23.243,40
178	Minibus	000004	Toyota Veloz	1496	Campuran	2023	Pembelian	298.000
179	Lemari Penyimpan	000001			Kayu	2023	Pembelian	4.700

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
180	Lemari Besi/Metal	000008	Krisbow		Campuran	2023	Pembelian	3.680
181	Lemari Kayu	000001			Kayu	2023	Hibah	7.500
182	Filling Cabinet Besi	000027-000031	Brother		Besi	2023	Pembelian	19.750
183	Alat Penghancur Kertas	000001			Campuran	2023	Pembelian	5.850
184	Meja Kerja Kayu	000006-000020			Kayu	2023	Pembelian	46.800
185	Kursi Rapat	000003-000014	Brother			2023	Hibah	6.960
186	Kursi Putar	000009-000028				2023	Pembelian	80.000
187	AC Split	000022-000025	Polytron	2PK		2023	Pembelian	35.200
188	Portable AC	000001	Gree	3PK		2023	Pembelian	18.230
189	Televisi	000009-000010	LG Smart TV			2023	Pembelian	96.500
190	Sound System	000001	Aubern			2023	Pembelian	6.500
191	Microphone	000001-000002				2023	Pembelian	3.850
192	Dispenser	000006-000007	Panasonic			2023	Pembelian	6.294
193	Dispenser	000008				2023	Pembelian	3.996
194	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000002				2023	Pembelian	6.200
195	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000012-000016				2023	Pembelian	22.500
196	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000069-000073				2023	Pembelian	11.940
197	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000002	Chairman			2023	Hibah	1.500
198	Lensa Kamera	000001	Sony			2023	Pembelian	38.500
199	Lensa Kamera	000002	FE F4 Macro G			2023	Pembelian	25.439
200	Lensa Kamera	000003	E PZ F4 G			2023	Pembelian	15.000
201	Camera Digital	000002	Canon EOS			2023	Pembelian	29.475

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
202	Lampu Blitz Camera	000001	Sony Flash			2023	Pembelian	3.240
203	Handy Talkie	000002	Hytera			2023	Pembelian	6.701,48
204	PC Unit	000020-000029	Axioo Desktop			2023	Pembelian	104.600
205	PC Unit	000030-000037	Axioo AIO			2023	Pembelian	105.600
206	Laptop	000039	Axioo			2023	Pembelian	9.060
207	Laptop	000040	Advan			2023	Pembelian	8.169
208	Scanner	000003	Epson			2023	Pembelian	5.770
209	Printer	000033-000038	Epson			2023	Pembelian	28.278
210	Station Wagon	000003	Mitsubishi Xpander	1499		2024	Pembelian	279.900
211	Sepeda Motor	000134-000139	Yamaha Nmax	155			Pembelian	217.800
212	Rak-Rak Penyimpan	000001					Pembelian	7.900
213	Lemari Penyimpan	000002					Pembelian	5.000
214	Lemari Penyimpan	000003	Custom		Kayu		Pembelian	30.535
215	Rak Kayu	000001-000002			Kayu		Pembelian	7.600
216	Filling Cabinet Besi	000032-000034	Brother		Besi		Pembelian	14.199
217	Locker	000001	Brother		Besi		Pembelian	2.400
218	Alat Penyimpan Kantor Lainnya	000002					Pembelian	11.400
219	CCTV	000003					Pembelian	11.489
220	CCTV	000004	HK Vision				Pembelian	4.350
221	Meja Kerja Kayu	000021-000070			Kayu		Pembelian	200.304
222	Kursi Besi/Metal	000009-000018					Pembelian	23.040
223	Kursi Rapat	000015-000054	Chitose				Pembelian	28.800

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
224	Kursi Putar	000029-000037	Donati				Pembelian	30.040
225	Kursi Lipat	000021-000026					Pembelian	3.720
226	Sofa	000003-000006					Pembelian	43.960
227	Lemari Es	000004-000005	Polytron				Pembelian	12.750
228	AC Sentral	000001					Pembelian	12.000
229	AC Split	000026-000032	Panasonic	2PK			Pembelian	68.600
230	AC Split	000033-000034	Polytron	0,5PK			Pembelian	9.600
231	Kompor Gas	000001	Rinnai		Logam		Pembelian	900
232	Tabung Gas	000001	Bright		Logam		Pembelian	1.400
233	Televisi	000011	LG	65”			Pembelian	18.800
234	Sound System	000002					Pembelian	25.700
235	Dispenser	000009-000011	Panasonic				Pembelian	9.360
236	Tangga	000001			Logam		Pembelian	2.600
237	Bracket Standing Peralatan	000001			Logam		Pembelian	5.750
238	Meja Tamu Biasa	000001					Pembelian	4.000
239	Lemari Buku Arsip	000001	Custom				Pembelian	10.100
240	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	000001-000002	Optima				Pembelian	10.200
241	Audio Mixing	000002	Yamaha				Pembelian	4.100
242	Microphone	000001-000002					Pembelian	4.000
243	Utility Trolley	000001			Besi		Pembelian	6.610
244	Stabilezer UPS	000001-000020					Pembelian	33.600

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
245	Tabung Breathing Aparatus	000001-000004	Tonata		Logam		Pembelian	5.000
246	Chest Freezer	000001					Pembelian	3.475
247	PC Unit	000038-000049	Acer				Pembelian	164.400
248	Laptop	000042-000043	Acer				Pembelian	25.200
249	Scanner	000004-000005	Epson				Pembelian	15.058
250	Monitor	000002	HK Vision				Hibah	1.275
251	Monitor	000003	HK Vision				Pembelian	1.275
252	Printer	000039-000042	Epson				Pembelian	20.000

Tabel 2.6
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Konstruksi	Luas Bangunan (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Kondisi	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil		300	Jl. Prof Sudarto, SH No. 116 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Baik	Tanah Milik Pemda	Pembelian	23.488,61
2	Jalan Kota	Betonisasi	160	Kel. Pakintelan RT.01/RW.03	Baik	Tanah Milik Pemda	Pembelian	161.395,15
3	Jalan Kota	Betonisasi	135	Kel. Bendan Dhuwur RT.04/RW.02	Baik	Tanah Milik Pemda	Pembelian	155.785,02
4	Jalan Kota	Betonisasi	73	Kel. Bendan Dhuwur RT.04/RW.02	Baik	Tanah Milik Pemda	Pembelian	75.444,26
5	Jalan Kota	Pavingisasi	680	Kel. Pakintelan RW.03	Baik	Tanah Milik Pemda	Pembelian	148.513,73

Tabel 2.7
Aset Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Pencipta	Judul/Nama	Spesifikasi	Kondisi	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	Software	2017		CV. Irnata Jaya			Pembelian	22.355.688

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

a. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indikator Tujuan OPD																		
a	Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-
b	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Point			N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	70,59	71,8	71,36	71,36	-	-	114,5	110,6	107,6	-
c	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%			N/A	90	91	92	93	-	92,46	100	98,87	-	-	102,7	109,9	107,5	-
2	Indikator Sasaran OPD																		
a	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%			N/A	51,24	51,27	51,29	51,32	51,3	49,78	48,76	50,42	-	-	97,15	95,23	98,3	-
b	Persentase cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-
c	Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	%			N/A	28,25	42,37	56,49	84,74	2,25	33,89	42,37	100	-	-	120	100,2	177	-
d	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-
e	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point			N/A	701	8011	801	801	738,3	744,4	833,1	884,6	-	-				-
f	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-
g	Nilai SAKIP	Point			N/A	70,1	70,44	70,7	71	74,58	76,71	78,75	77,85	-	-	109,4	111,9	110,1	-
3	Indikator Kinerja Daerah																		
a	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%			-	-		-	-	17,14	59,38	48,89	48,90	-	-	-	-	-	-
b	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%			-	-		-	-	0,017	0,028	0,027	0,03	-	-	-	-	-	-
c	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%			-	-		-	-	18,78	25,46	25,08	25,78	-	-	-	-	-	-
d	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			-	-		-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
e	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point			-	-		-	-	73,64	73,93	73,86	78,71	-	-	-	-	-	-
f	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Point			-	-		-	-	N/A	70,59	71,80	71,36	-	-	-	-	-	-
g	Rasio KDRT	%			-	-		-	-	0,02	0,025	0,025	0,031	-	-	-	-	-	-

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.960.579.250	9.220.621.984	10.814.492.709	13.291.031.183	14.084.990.743,34	8.687.709.864	8.801.051.760	10.230.135.069	12.441.555.829		87,2%	95,4%	94,6%	93,6%		9,68%	13,05%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.181.006.625	956.461.200	1.188.188.288	1.493.250.884	764.036.727	959.129.263	878.654.816	1.103.859.260	1.311.181.168		81,2%	91,9%	92,9%	87,8%		-4,49%	12,01%
Program Perlindungan Perempuan	1.770.460.690	1.847.266.588	2.190.227.619	2.709.814.502	874.861.477	1.295.497.736	1.437.012.753	1.704.809.670	2.267.479.238		73,2%	77,8%	77,8%	83,7%		-5,27%	20,85%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.401.602.913	1.615.496.770	1.885.339.165	2.541.698.720	1.314.719.130	1.145.392.625	1.403.540.832	1.709.495.752	2.351.276.116		81,7%	86,9%	90,7%	92,5%		4,63%	27,29%
Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	471.151.847	163.399.940	318.495.190	246.319.980	209.769.098	426.137.405	159.078.700	307.375.000	232.477.515		90,4%	97,3%	96,5%	94,4%		-1,98%	2,06%
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	569.087.058	315.948.200	3.466.273.136	1.667.108.926	1.264.596.873	382.999850	279.055.413	3.304.637.648	1.468.090.360		67,3%	88,3%	95,3%	88,1%		219,14%	333,84%
Program Perlindungan Khusus Anak	633.939.886	529.047.209	432.208.570	173.359.216	261.906.421	334.734.600	342.133.900	366.455.065	105.819.713		52,8%	64,7%	84,8%	61%		-10,92%	-20,60%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	509.807.700	78.056.220	729.977.134	685.006.791	-	485.378.880	70.708.500	704.930.950		-	95,2%	90,6%	96,6%		248,11%	405,76%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	1.380.996.941	1.703.349.925	2.055.920.151	3.348.687.962,70	-	1.269.973.675	1.525.619.802	1.927.627.856		-	92%	89,6%	93,8%		35,64%	23,24%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG	15.987.828.269	16.539.046.532	22.076.630.822	24.908.480.696	22.808.575.223,04	13.231.601.343	15.055.880.729	20.323.095.766	22.810.438.745		82,8%	91%	92,1%	91,6%		10,33%	20,34%

c. Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam Pemberian Pelayanan

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki beberapa mitra yang bersinergi bersama dalam melayani masyarakat diantaranya :

1. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang;
2. Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKKG) Kota Semarang;
3. Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA) Kota Semarang;
4. Forum Komunikasi Perempuan Mandiri, Tangguh dan Hebat (FORKOM PERMATA HEBAT) Kota Semarang;
5. Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang;
6. Gabungan Organisasi Pengurus TKI Kota Semarang;
7. Tim Penggerak PKK Kota Semarang;
8. Forum Posyandu Kota Semarang;
9. Forum Media Sayang Perempuan dan Anak (SAPA) Kota Semarang;
10. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Semarang;
11. Forum Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (GARPUPERAK) Kota Semarang;
12. Forum Anak Kota Semarang;
13. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Semarang;
14. Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak);
15. Forum LPMK Kota Semarang;
16. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Kota Semarang;

d. Penghargaan yang Diraih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Adapun beberapa penghargaan ang berhasil diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam kurun waktu dari tahun 2021-2024 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil meraih Predikat UTAMA untuk Kota Semarang pada Kategori Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil mempertahankan Predikat NINDYA untuk Kota Semarang yang ketiga kalinya pada Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK Kota Semarang

berhasil mendapat Juara III Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Purwosari dalam Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meraih Juara III kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2022;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil meraih Predikat UTAMA untuk Kota Semarang pada Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil meraih Predikat MENTOR untuk Kota Semarang pada Kategori Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendapatkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) untuk Kota Semarang Tahun 2023;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi pemberian penghargaan unit yang telah mengikuti proses standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) yaitu SMP N 21, SMP N 1, SMP N 2, SMP N 36, SMP N 33, SMP N 39, dan SMP IT PAPB Kota Semarang;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Pedalangan pada Lomba Pelaksana Posyandu Terbaik yang berhasil meraih Juara II Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Gedawang dalam Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meraih Juara Harapan I kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2023.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2024;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Pudakpayung dalam Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meraih Juara I kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2024;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Pudakpayung dalam Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional yang berhasil meraih Juara III kategori Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2024

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
3. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
5. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual, bullying dan penipuan;
6. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
7. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah :

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030;
4. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan

tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan setelah mempelajari serta memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu :

1. "Masih tingginya ketimpangan gender dalam pembangunan"

2. "Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan"

yang kemudian dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Rumusan Permasalahan
"Masih tingginya ketimpangan gender dalam pembangunan"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih kurangnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kualitas hidup keluarga	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Belum optimalnya pengelolaan sistem data informasi gender dan anak
		Masih kurangnya upaya dalam perlindungan perempuan
2	Masih kurangnya kesejahteraan dan perlindungan anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak
		Masih kurangnya upaya dalam perlindungan khusus anak

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
b. Masih kurangnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan;
c. Belum optimalnya penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;

d. Masih kurangnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak;
e. Belum optimalnya penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak;
f. Belum optimalnya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
g. Belum optimalnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
h. Masih kurangnya penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
i. Masih kurangnya kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan;
j. Masih kurangnya kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan;
k. Masih kurangnya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
l. Belum optimalnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
m. Masih kurangnya fasilitasi lembaga layanan pemenuhan hak anak
n. Belum optimalnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;
o. Masih kurangnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi;
p. Masih kurangnya kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan AMPK;
q. Masih kurangnya kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan AMPK.

Tabel 2.11
Rumusan Permasalahan
"Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih kurangnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
		Masih kurangnya kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan
2	Belum optimalnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Masih kurangnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
b. Belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat;
c. Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kelurahan;

d. Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;

e. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;

f. Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting. Periode RPJMN Tahun 2025-2029 sangat strategis sebagai fondasi awal untuk meneruskan kemajuan bangsa dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045. Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 meliputi (1) pendapatan Per kapita setara negara maju, (2) adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan (5) intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, selain telah menetapkan visi, Presiden memberikan 8 (delapan) misi yang disebut sebagai Asta Cita sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025 2029 yang meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai Visi dan Misi Presiden, dalam RPJMN 2024-2029 telah ditetapkan 17 program prioritas nasional yang meliputi:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;

3. Reformasi Politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Memberantas kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Pelayanan kesehatan yang merata bagi rakyat;
8. Penguatan bidang pendidikan, sains, dan teknologi, juga digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Jaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja dan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Dari 17 Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2024 2029, masing-masing agenda dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung 2 (dua) Program Prioritas yaitu terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas. Sedangkan Program Prioritas yang terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat adalah Memberantas Kemiskinan

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Ketercapaian visi selama lima tahun dirumuskan dalam tujuan yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan arah capaian visi. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dijabarkan secara

teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dari setiap pokok visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif, dirumuskan tujuan sebagai berikut:
   a. Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing;
   b. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat;
   c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian;
   d. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.
2. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif, dirumuskan tujuan Menurunnya kemiskinan secara inklusif.
3. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat.
4. Pada pokok visi Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat

Dari beberapa tujuan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, maka juga telah ditetapkan hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian dapat diwujudkan dengan Meningkatnya kesetaraan gender, melalui Indeks Pembangunan Gender.

Sedangkan untuk mewujudkan pembangunan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat dapat diwujudkan dengan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Indeks Pembangunan Gender dan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

c. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian

tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu

"Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak"

Tujuan diatas dijabarkan menjadi beberapa sasaran strategis yaitu :

1. Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Penguatan Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan
3. Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Bebas dari Kekerasan
4. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak
5. Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dituangkan di bawah ini.

Tabel 2.12
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Perspektif Stakeholders	
	1. Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	a. IPG b. IKG c. Prevalensi kekerasan thd. Perempuan d. Prevalensi kekerasan thd Anak
	Perspektif Customers	
	2. Penguatan Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan	K/L dan Pemda yg memperoleh PPE
	3. Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Bebas dari Kekerasan	Prevalansi Kekerasan thd Perempuan
	4. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
	5. Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya	a. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) b. Prevalensi kekerasan thd Anak

d. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Apabila dirumuskan, hasil telaah Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yang mendasarkan pada RPJMN tahun 2025-2029 dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan faktor pendorongnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1. Menurunkan tingkat kemiskinan 2. Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan 4. Transformasi sektor publik sebagai pengungkit	1. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang kurang memadai 2. Belum optimalnya pengelolaan data dan Informasi Kependudukan 3. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; 4. Belum Semua Kabupaten menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan perdesaan untuk pengembangan ekonomi lokal. 5. Aksesibilitas di Desa yang terbatas 6. Kompetensi SDM aparatur desa yang masih lemah 7. Infrastruktur pendukung Pemerintahan Desa yang kurang memadai 8. Masih belum meratanya akses layanan dasar di Desa 9. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	Faktor Penghambat: 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Belum seluruh Kabupaten menetapkankan kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. 5. Belum adanya *baseline* data klasifikasi pasar desa di masing-masing kabupaten. Faktor Pendorong: 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; 4. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa 5. Peran perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (non-government organisation/NGO) dalam peningkatan kapasitas, pendampingan, dan pengawasan pembangunan di Desa

e. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Meningkatnya Keluarga Berkualitas;
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pencegahan dan Layanan Kekerasan terhadap Perempuan;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak;
3. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak;
4. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Bidang Pembangunan
5. Terkendalinya Jumlah Penduduk;
6. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

f. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan Desa Mandiri.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

3. Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah;

4. Peningkatan Kemandirian Desa di Jawa Tengah

g. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

h. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah terkait belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender

Tabel 2.14
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	1. Masih kurangnya kesetaraan gender
	2. Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dan perempuan

Tabel 2.15
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Semarang Tahun 2025-2029 Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan								
1	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	12	12	13	13	14	Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Mendorong komitmen dari seluruh stakeholder dalam mengevaluasi kebijakan responsif gender agar lebih maksimal
2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,045%	0,044%	0,043%	0,042%	0,041%	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan
3	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,014%	0,014%	0,013%	0,013%	0,012%		Memaksimalkan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di masyarakat

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	20%	20%	20%	20%	20%	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/kota menjadi 17%.	Mendorong Partai politik dapat menerapkan aturan internal agar 30% perempuan dapat menempati kepengurusan partai
5	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	48,75%	48,80%	48,85%	48,90%	48,95%	Meningkatnya indeks perberdayaan Gender (IDG)	Mendorong Pemerintah Daerah dalam program jenjang karir untuk perempuan pengambil keputusan
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara								
1	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	245	245	240	240	240	Terbitnya rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	Sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan serta penyampaian informasi hak korban
Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
1	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	0,010%	0,009%	0,008%	0,007%	0,006%		Sosialisasi mengenai parenting dan hak hak anak dalam rumah tangga
2	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	0,060%	0,059%	0,058%	0,057%	0,056%	Menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Sosialisasi tentang perlindungan diri dan batas-batas perilaku yang tidak pantas terhadap anak
3	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%		Sosialisasi untuk peningkatan literasi masyarakat mengenai modus perdagangan orang

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
4	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0,005%	0,004%	0,004%	0,003%	0,002%		Sosialisasi mengenai kekerasan seksual dan batasan area tubuh pribadi
5	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	20%	20%	20%	20%	20%	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/kota menjadi 17%.	Mendorong Partai politik dapat menerapkan aturan internal agar 30% perempuan dapat menempati kepengurusan partai
6	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	24%	24%	24%	25%	25%		Mendorong Pemerintah Daerah dalam program jenjang karir untuk pelatihan kepemimpinan perempuan
7	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	245	245	240	240	240	Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan serta penyampaian informasi hak korban

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.16
Isu Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Masih kurangnya kesetaraan gender	a. Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender; b. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah; c. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga					
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Belum optimalnya pengelolaan sistem data informasi gender dan anak					
Program Perlindungan Perempuan	Masih kurangnya upaya dalam perlindungan perempuan	Masih kurangnya perlindungan terhadap perempuan	Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Bebas dari Kekerasan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama semua pihak, baik secara vertikal maupun horizontal oleh berbagai unit/lembaga layanan, sehingga perempuan korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya belum dapat tertangani secara baik dan optimal

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Program Pemenuhan Hak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	Masih kurangnya perlindungan terhadap anak	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	a. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak; b. Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Belum optimalnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Masih kurangnya upaya dalam perlindungan khusus anak					
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Masih kurangnya kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Pengentasan kemiskinan	Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan masih lemahnya jejaring pengembangan ekonomi masyarakat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada Visi dan Misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Ketimpangan Gender dalam Pembangunan; dan
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

Adapun untuk tujuan diatas memiliki indikator yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG);

   Indikator tujuan diatas diukur menggunakan 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu kesehatan reproduksi; pemberdayaan; dan pasar tenaga kerja yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

2. Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan

   Indikator tujuan diatas diukur menggunakan 8 (delapan) unsur pada pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan yaitu unsur sosial; unsur kesehatan; unsur lingkungan hidup; unsur pemenuhan infrastuktur; unsur ekonomi; unsur koordinasi dan kolaborasi; unsur partisipasi dan peran aktif;unsur efektifitas dan hasil kinerja.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga;
2. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
3. Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas.
4. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah

Adapun untuk sasaran diatas memiliki indikator yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

   Indikator sasaran diatas diukur menggunakan 3 dimensi penyusun yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Nilai IDG dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

   Indikator sasaran diatas diukur dengan proyeksi nilai bobot bagi Kabupaten/Kota dan tiap kab/kota untuk menyiapkan semua dokumen pelengkap disetiap klaster yang diintervensi. Klaster yang akan menjadi penilaian dari IPA ada 5 diantaranya : klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan luang dan kegiatan budaya, klaster perlindungan khusus. Nilai IPA dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS);

3. Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota

   Indikator sasaran diatas diukur dengan Persentase pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan ditambah Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas;

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

   Indikator sasaran diatas diukur dengan penilaian AKIP Perangkat Daerah diambil dari angka yang dikeluarkan oleh Inspektorat;

5. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

   Indikator sasaran diatas diukur dengan penilaian dari AsikMas milik Bagian Organisasi.

Untuk penjabaran rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kesetaraan gender	Menurunnya Ketimpangan Gender dalam Pembangunan		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,135	0,13	0,125	0,12	0,115	0,11	
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78,71	78,71	78,71	78,72	78,72	78,72	
		Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,37	71,38	71,39	71,40	71,41	71,42	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	77,85	77,85	77,90	77,95	78,00	78,05	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	90,46	90,46	90,47	90,48	90,49	90,5	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan	Angka	4,20	4,20	4,33	4,53	4,60	4,65	
		Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas	Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	Angka	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pengembangan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Penguatan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Percepatan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Perwujudan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Pengembangan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	Peningkatan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	Penguatan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	Percepatan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	Perwujudan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pengembangan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak	Peningkatan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak	Penguatan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak	Percepatan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak	Perwujudan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak
Pengembangan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan	Peningkatan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan	Penguatan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan	Percepatan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan	Perwujudan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan
Pengembangan optimalisasi pemenuhan hak anak	Peningkatan optimalisasi pemenuhan hak anak	Penguatan optimalisasi pemenuhan hak anak	Percepatan optimalisasi pemenuhan hak anak	Perwujudan optimalisasi pemenuhan hak anak
Pengembangan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak	Peningkatan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak	Penguatan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak	Percepatan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak	Perwujudan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak
Pengembangan optimalisasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat	Penguatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat	Percepatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat	Perwujudan optimalisasi pemberdayaan masyarakat
Pengembangan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Peningkatan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Penguatan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Percepatan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Perwujudan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan
Pengembangan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Peningkatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Penguatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Percepatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Perwujudan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tabel 3.3
Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	Meningkatnya kesetaraan gender	Peningkatan kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Peningkatan pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah
			Peningkatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
			Optimalisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
			Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
			Optimalisasi penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
			Optimalisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data
			Optimalisasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			Peningkatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan
			Penambahan jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan
			Penambahan jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan
			Peningkatan kegiatan untuk pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
			Optimalisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
			Peningkatan fasilitasi lembaga layanan pemenuhan hak anak
			Optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak
			Peningkatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
			Penambahan jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan AMPK
			Penambahan jumlah kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan AMPK
			Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
			Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Peningkatan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
			Optimalisasi pengembangan ekonomi masyarakat
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kelurahan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
Meningkatnya kesetaraan gender					Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Kepala Dinas
	Menurunnya Ketimpangan Gender dalam Pembangunan				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Kepala Dinas
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Kepala Dinas
			Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender		Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
				Meningkatnya kegiatan kelembagaan PUG	Jumlah kegiatan pelembagaan PUG	2.08.02.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2.08.02.2.01.0010 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG	2.08.02.2.01.0012 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					kewenangan Kabupaten/Kota	penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	2.08.02.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender
					Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Bertambahnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2.08.02.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender
					Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.03.0007 Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				Meningkatnya kegiatan penceghan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten /Kota	
				Bertambahnya layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0003 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0004 Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban	2.08.03.2.02.0005 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0006 Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0007 Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
				Meningkatnya kegiatan edukasi penanganan untuk	Jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk		Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				lembaga layanan perlindungan perempuan	lembaga layanan perlindungan perempuan		
					Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.03.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya ketahanan keluarga		Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
					Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)		
				Meningkatnya kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga
					Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0007 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				Bertambahnya layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0004 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0005 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel		Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
				Meningkatnya kegiatan untuk penyajian data gender dan anak	Jumlah kegiatan penyajian data gender dan anak	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Data dan Informasi
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan	2.08.05.2.01.0004 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	dalam penyediaan data gender dan anak	
		Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak			Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Kepala Dinas
			Meningkatnya akses pemenuhan hak-hak anak		Nilai Pemenuhan Hak Anak	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				Meningkatnya kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pendidikan dan Kesehatan
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				Meningkatnya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pendidikan dan Kesehatan
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
			Menurunnya kekerasan terhadap anak		Nilai Perlindungan Khusus Anak	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
				Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Bertambahnya layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0009 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Anak	2.08.07.2.02.0010 Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0011 Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0012 Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0014 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				Meningkatnya kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kepala Dinas
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kepala Dinas
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan	2.08.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
			kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		dan Perlindungan Anak yang berkualitas		
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				Perlindungan Anak Kota Semarang			
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				Perlindungan Anak Kota Semarang	Kota Semarang sesuai ketentuan		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Kepala Dinas
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan		Kepala Dinas
		Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas			Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota		Kepala Dinas

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
			Meningkatnya kualitas proses administrasi kelurahan		Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
				Meningkatnya kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sub Koordinator Perkembangan Kelurahan
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan		Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
				Meningkatnya kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Sub Koordinator Perkembangan Kelurahan
				Meningkatnya kegiatan pengembangan	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat		Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				ekonomi masyarakat		Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,danKarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Walikota Semarang
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Program Proritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten /Kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			2.08.03.2.02.0003 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			2.08.03.2.02.0004 Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0005 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0006 Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0007 Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan

No	Program Proritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap anak
			2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0009 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0010 Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0011 Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0012 Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0014 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap anak
			2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
2	Optimalisasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rencana aksi : Penyelenggaraan PUG

No	Program Proritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			2.08.02.2.01.0012 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penyelenggaraan PUG
			2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pemberdayaan perempuan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan perempuan
			2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pemberdayaan perempuan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan perempuan
			2.08.02.2.03.0007 Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pemberdayaan perempuan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan perempuan
			2.08.04.2.01.0007 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan	Rencana aksi : Implementasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)
			2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
			2.08.04.2.03.0004 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
			2.08.04.2.03.0005 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
			2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
3	Penyelenggaraan Kongres Perempuan	Meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai bidang	2.08.02.2.01.0010 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Fasilitasi pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia
4	Penyelenggaraan Konferensi Anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Advokasi lembaga Jejaring Pemenuhan Hak Anak

No	Program Proritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penunjang Kota Layak Anak
			2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pelatihan Konvensi Hak Anak
			2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penguatan Lembaga Informasi Layak Anak
			2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Evaluasi Sekolah Ramah Anak
			2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Fasiltasi Daycare Anak

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terdapat pada lampiran tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG				Rp. 25.304.642.526		Rp. 27.981.762.998		Rp. 29.146.970.439		Rp. 29.361.002.488		Rp. 29.865.859.768
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				21.617.108.610		23.904.104.127		24.899.511.028		25.082.353.131		25.513.639.787
2.08.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	100%	100%	11.172.837.357	100%	11.748.093.019	100%	12.334.747.669	100%	12.985.735.052	100%	13.597.521.808
2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Tersedianya acuan pelaksanaan phrogram, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	35.845.220	100%	37.929.742	100%	39.076.229	100%	75.280.041	100%	41.544.043
2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	15.000.000	4 Dok	15.000.000	4 Dok	15.000.000	4 Dok	50.000.000	5 Dok	15.000.000
2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	3.617.900	1 Dok	3.979.690	1 Dok	4.178.675	1 Dok	4.387.608	1 Dok	4.606.989
2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	4.118.400	1 Dok	4.530.240	1 Dok	4.756.752	1 Dok	4.994.590	1 Dok	5.244.319
2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	2.783.000	2 Dok	3.061.300	2 Dok	3.214.365	2 Dok	3.375.083	2 Dok	3.543.837
2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD												
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.783.000	1 Dok	3.061.300	1 Dok	3.214.365	1 Dok	3.375.083	1 Dok	3.543.837
2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	6 Lap	4.698.320	6 Lap	5.168.152	6 Lap	5.426.560	6 Lap	5.697.888	6 Lap	5.982.782
2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	1.844.600	12 Lap	2.129.060	12 Lap	2.285.513	12 Lap	2.449.789	12 Lap	2.622.278
2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	11.136.992.136	100%	11.710.163.279	100%	12.295.671.443	100%	12.910.455.015	100%	13.555.977.765
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	72 Orang	10.810.561.416	72 Orang	11.351.089.487	72 Orang	11.918.643.961	72 Orang	12.514.576.159	72 Orang	13.140.304.967
2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	320.082.400	1 Dok	352.090.640	1 Dok	369.695.172	1 Dok	388.179.931	1 Dok	407.588.927
2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	2 Lap	1.483.680	2 Lap	1.632.048	2 Lap	1.713.650	2 Lap	1.799.333	2 Lap	1.889.300
2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	1.650.000	1 Dok	1.815.000	1 Dok	1.905.750	1 Dok	2.001.038	1 Dok	2.101.089
2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Lap	12 Lap	2.225.520	12 Lap	2.448.072	12 Lap	2.570.476	12 Lap	2.698.999	12 Lap	2.833.949
2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	989.120	1 Dok	1.088.032	1 Dok	1.142.434	1 Dok	1.199.555	1 Dok	1.259.533
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	100%	4.406.808.253	100%	5.597.311.258	100%	5.779.196.971	100%	5.269.379.532	100%	4.990.583.438
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100%	100%	387.478.036	100%	426.225.840	100%	447.537.132	100%	469.913.988	100%	493.409.688
2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000
2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dok	2 Dok	196.628.036	2 Dok	216.290.840	2 Dok	227.105.382	2 Dok	238.460.651	2 Dok	250.383.683
2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	360 Orang	250 Orang	40.850.000	250 Orang	59.935.000	250 Orang	70.431.750	250 Orang	81.453.338	250 Orang	93.026.004
2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100%	100%	1.418.781.606	100%	1.560.659.767	100%	1.638.692.755	100%	1.720.627.393	100%	1.455.535.182
2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.699.945	1 Paket	8.469.940	1 Paket	8.893.436	1 Paket	9.338.108	1 Paket	9.805.014
2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	233.941.268	2 Paket	257.335.395	2 Paket	270.202.165	2 Paket	283.712.273	2 Paket	297.897.886
2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41.383.375	2 Paket	45.521.713	2 Paket	47.797.798	2 Paket	50.187.688	2 Paket	52.697.072
2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	71.268.868	4 Paket	78.395.755	4 Paket	82.315.543	4 Paket	86.431.320	4 Paket	90.752.886

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	29.402.919	3 Paket	32.343.210	3 Paket	33.960.371	3 Paket	35.658.390	3 Paket	37.441.309
2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu												
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	78.518.550	12 Lap	86.370.405	12 Lap	90.688.925	12 Lap	95.223.372	12 Lap	99.984.540
2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lap	20 Lap	583.970.974	20 Lap	642.368.072	20 Lap	674.486.475	20 Lap	708.210.799	20 Lap	666.956.475
2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dok	3 Dok	372.595.707	3 Dok	409.855.278	4 Dok	430.348.042	4 Dok	451.865.444	5 Dok	200.000.000
2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100%	100%	423.211.359	100%	1.215.354.672	100%	1.178.142.556	100%	438.272.395	100%	269.044.528
2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	211.928.833	10 Unit	982.943.893	8 Unit	934.111.238	4 Unit	182.039.511	-	-
2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	87.753.534	5 Paket	96.528.887	5 Paket	101.355.332	5 Paket	106.423.098	5 Paket	111.744.253
2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	107.429.722	5 Paket	118.172.695	5 Paket	124.081.329	5 Paket	130.285.396	5 Paket	136.799.666
2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	16.099.270	2 Unit	17.709.197	2 Unit	18.594.657	2 Unit	19.524.390	2 Unit	20.500.609
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	1.224.253.668	100%	1.346.679.035	100%	1.414.012.987	100%	1.484.713.636	100%	1.558.949.318
2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	48 Lap	354.107.160	48 Lap	389.517.876	48 Lap	408.993.770	48 Lap	429.443.458	48 Lap	450.915.631
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	870.146.508	12 Lap	957.161.159	12 Lap	1.005.019.217	12 Lap	1.055.270.178	12 Lap	1.108.033.686
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai ketentuan	100%	100%	953.083.584	100%	1.048.391.943	100%	1.100.811.540	100%	1.155.852.117	100%	1.213.644.723
2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	48.355.999	1 Unit	53.191.599	1 Unit	55.851.179	1 Unit	58.643.738	1 Unit	61.575.925
2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	32 Unit	521.839.966	37 Unit	574.023.962	40 Unit	602.725.161	40 Unit	632.861.419	42 Unit	664.504.490
2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	65.167.565	10 Unit	71.684.322	10 Unit	75.268.538	10 Unit	79.031.965	10 Unit	82.983.563
2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	266.014.100	3 Unit	292.615.510	3 Unit	307.246.286	3 Unit	322.608.600	3 Unit	338.739.030
2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	6 Unit	6 Unit	51.705.954	6 Unit	56.876.550	6 Unit	59.720.377	6 Unit	62.706.396	6 Unit	65.841.716

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi											
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan												
Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	48,89%	68,63%	1.380.912.301	68,78%	1.527.006.781	68,93%	1.590.593.899	69,08%	1.602.273.949	69,23%	1.629.824.768
2.08.02.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan kelembagaan PUG	Jumlah kegiatan pelembagaan PUG	N/A	5 Kgt	660.912.301	5 Kgt	737.006.781	5 Kgt	760.593.899	5 Kgt	772.273.949	5 Kgt	782.824.768
2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG												
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	30.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	55.000.000
2.08.02.2.01.0010 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota												
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	N/A	2 Kbjkn	580.912.301	2 Kbjkn	637.006.781	2 Kbjkn	650.593.899	2 Kbjkn	662.273.949	2 Kbjkn	662.824.768
2.08.02.2.01.0012 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	2 Lap	50.000.000	2 Lap	60.000.000	2 Lap	60.000.000	2 Lap	60.000.000	2 Lap	65.000.000
2.08.02.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	N/A	8 Kgt	270.000.000	8 Kgt	290.000.000	8 Kgt	300.000.000	8 Kgt	300.000.000	8 Kgt	307.000.000
2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	N/A	100 Org	210.000.000	100 Org	220.000.000	100 Org	230.000.000	100 Org	230.000.000	100 Org	232.000.000
2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	N/A	100 Org	60.000.000	100 Org	70.000.000	100 Org	70.000.000	100 Org	70.000.000	100 Org	75.000.000
2.08.02.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Bertambahnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	N/A	29 Lbg	450.000.000	29 Lbg	500.000.000	29 Lbg	530.000.000	29 Lbg	530.000.000	29 Lbg	540.000.000
2.08.02.2.03.0007 Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	N/A	24 Lbg	450.000.000	24 Lbg	500.000.000	24 Lbg	530.000.000	24 Lbg	530.000.000	24 Lbg	540.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota												
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan												
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	0,03%	0,039	1.350.895.506	0,039	1.493.814.340	0,038	1.556.019.269	0,037	1.567.445.431	0,036	1.594.397.379
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan penceghan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	N/A	6 Kgt	300.000.000	6 Kgt	330.000.000	6 Kgt	346.500.000	6 Kgt	350.000.000	6 Kgt	350.000.000
2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten /Kota												
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	N/A	16 Lbg	300.000.000	20 Lbg	330.000.000	24 Lbg	346.500.000	28 Lbg	350.000.000	32 Lbg	350.000.000
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
Bertambahnya layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	N/A	260 Lynan	650.895.506	259 Lynan	693.814.340	258 Lynan	704.519.269	257 Lynan	712.445.431	256 Lynan	734.397.379
2.08.03.2.02.0003 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS,	N/A	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota											
2.08.03.2.02.0004 Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
2.08.03.2.02.0005 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	240 Orang	150.000.000	240 Orang	150.000.000	240 Orang	150.000.000	240 Orang	150.000.000	240 Orang	150.000.000
2.08.03.2.02.0006 Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	20 Orang	80.000.000	20 Orang	80.000.000	20 Orang	80.000.000	20 Orang	80.000.000	20 Orang	80.000.000
2.08.03.2.02.0007 Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000
2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000
2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	200 Orang	170.895.506	200 Orang	213.814.340	200 Orang	224.519.269	200 Orang	232.445.431	200 Orang	254.397.379
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	N/A	4 Kgt	400.000.000	4 Kgt	470.000.000	4 Kgt	505.000.000	4 Kgt	505.000.000	4 Kgt	510.000.000
Meningkatnya kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	N/A	4 Kgt		4 Kgt		4 Kgt		4 Kgt		4 Kgt	
2.08.03.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	N/A	20 Lbg	200.000.000	20 Lbg	250.000.000	20 Lbg	250.000.000	20 Lbg	250.000.000	20 Lbg	250.000.000
2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	N/A	120 Orang	200.000.000	120 Orang	220.000.000	120 Orang	255.000.000	120 Orang	255.000.000	120 Orang	260.000.000
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga												
Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	557.213.881	100%	616.164.672	100%	641.822.800	100%	646.535.833	100%	657.652.903
	Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	1,13%	4,52%		9,04%		13,56%		18,08%		22,6%	
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	N/A	2 Kgt	242.213.881	2 Kgt	286.164.672	3 Kgt	286.822.800	3 Kgt	291.535.833	4 Kgt	302.652.903
2.08.04.2.01.0007 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	2 Dok	242.213.881	2 Dok	286.164.672	3 Dok	286.822.800	3 Dok	291.535.833	4 Dok	302.652.903
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Bertambahnya layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	N/A	100 Lyanan	315.000.000	105 Lyanan	330.000.000	107 Lyanan	355.000.000	110 Lyanan	355.000.000	115 Lyanan	355.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota												
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	N/A	25 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	55.000.000
2.08.04.2.03.0004 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota												
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	N/A	100 Orang	100.000.000	105 Orang	100.000.000	107 Orang	110.000.000	110 Orang	110.000.000	115 Orang	110.000.000
2.08.04.2.03.0005 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota												
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	N/A	100 Orang	80.000.000	105 Orang	80.000.000	107 Orang	90.000.000	110 Orang	90.000.000	115 Orang	90.000.000
2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	N/A	150 Orang	85.000.000	155 Orang	100.000.000	160 Orang	100.000.000	165 Orang	100.000.000	170 Orang	100.000.000
2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak												
Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	50%	50%	283.610.935	52%	313.615.731	54%	326.675.215	57%	329.074.056	60%	334.732.427

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan untuk penyajian data gender dan anak	Jumlah kegiatan penyajian data gender dan anak	2 Kgt	4 Kgt	283.610.935	4 Kgt	313.615.731	4 Kgt	326.675.215	4 Kgt	329.074.056	4 Kgt	334.732.427
2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota												
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A	4 Dok	183.610.935	4 Dok	203.615.731	4 Dok	211.675.215	4 Dok	214.074.056	4 Dok	214.732.427
2.08.05.2.01.0004 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak												
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	N/A	15 SH	100.000.000	15 SH	110.000.000	15 SH	115.000.000	15 SH	115.000.000	15 SH	120.000.000
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
Meningkatnya akses pemenuhan hak-hak anak	Nilai Pemenuhan Hak Anak	69,29	66,34	1.012.733.443	66,34	1.119.876.211	66,36	1.166.509.730	66,38	1.175.075.645	66,38	1.195.280.865
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	N/A	7 Kgt	500.000.000	7 Kgt	560.000.000	7 Kgt	590.000.000	7 Kgt	595.075.645	7 Kgt	615.280.865
2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	250 Lbg	250.000.000	250 Lbg	260.000.000	250 Lbg	270.000.000	250 Lbg	270.000.000	250 Lbg	270.000.000
2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	3 Dok	250.000.000	3 Dok	300.000.000	3 Dok	320.000.000	3 Dok	325.075.645	3 Dok	345.280.865
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	N/A	6 Kgt	512.733.443	6 Kgt	559.876.211	6 Kgt	576.509.730	6 Kgt	580.000.000	6 Kgt	580.000.000
2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	N/A	60 Orang	80.000.000	60 Orang	90.000.000	60 Orang	90.000.000	60 Orang	90.000.000	60 Orang	90.000.000
2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	N/A	5 Lbg	35.000.000	5 Lbg	40.000.000	5 Lbg	40.000.000	5 Lbg	40.000.000	5 Lbg	40.000.000
2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	3 Dok	120.000.000	3 Dok	130.000.000	3 Dok	130.000.000	3 Dok	130.000.000	3 Dok	130.000.000
2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	N/A	2 Lbg	277.733.443	2 Lbg	299.876.211	2 Lbg	316.509.730	2 Lbg	320.000.000	2 Lbg	320.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak												
Menurunnya kekerasan terhadap anak	Nilai Perlindungan Khusus Anak	83,86	89,76	341.461.951	89,76	377.587.131	89,78	393.310.491	89,8	396.198.649	89,8	403.011.215
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	N/A	6 Kgt	71.461.951	6 Kgt	107.587.131	6 Kgt	123.310.491	6 Kgt	126.198.649	6 Kgt	133.011.215
2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	N/A	6 Lbg	71.461.951	6 Lbg	107.587.131	6 Lbg	123.310.491	6 Lbg	126.198.649	6 Lbg	133.011.215
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Bertambahnya layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	120 Lyanan	120.000.000	118 Lyanan	120.000.000	115 Lyanan	120.000.000	113 Lyanan	120.000.000	110 Lyanan	120.000.000
2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000
2.08.07.2.02.0009 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000
2.08.07.2.02.0010 Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000
2.08.07.2.02.0011 Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000
2.08.07.2.02.0012 Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000
2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000
2.08.07.2.02.0014 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda,												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	2 Kgt	150.000.000	2 Kgt	150.000.000	2 Kgt	150.000.000	2 Kgt	150.000.000	2 Kgt	150.000.000
Meningkatnya kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	1 Kgt		1 Kgt		1 Kgt		2 Kgt		2 Kgt	
2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota												
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	N/A	3 Dok	100.000.000	3 Dok	100.000.000	3 Dok	100.000.000	3 Dok	100.000.000	3 Dok	100.000.000
2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	N/A	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat				3.687.533.916		4.077.658.871		4.247.459.411		4.278.649.357		4.352.219.981
2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa												
Meningkatnya kualitas proses administrasi kelurahan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	100%	100%	744.736.278	100%	823.526.118	100%	857.819.124	100%	864.118.261	100%	878.976.623
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												
Meningkatnya kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	N/A	5 Kgt	794.736.278	5 Kgt	823.526.118	5 Kgt	857.819.124	5 Kgt	864.118.261	5 Kgt	878.976.623
2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa												
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	N/A	1 Dok	44.736.278	1 Dok	50.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	63.000.000
2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa												
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	N/A	1 Dok	50.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	58.000.000
2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa												
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	N/A	177 Orang	200.000.000	177 Orang	200.000.000	177 Orang	210.000.000	177 Orang	210.000.000	177 Orang	215.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa												
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	112.000.000
2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan												
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dok	2 Dok	400.000.000	2 Dok	408.526.118	2 Dok	422.819.124	2 Dok	429.118.261	2 Dok	430.976.623
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat												
Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	2.942.797.638	100%	3.254.132.753	100%	3.389.640.287	100%	3.414.531.096	100%	3.473.243.358
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	150 Orang	2.942.797.638	150 Orang	3.254.132.753	150 Orang	3.389.640.287	150 Orang	3.414.531.096	150 Orang	3.473.243.358
Meningkatnya kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat	N/A	2 Kgt		2 Kgt		2 Kgt		2 Kgt		2 Kgt	
2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dok	2 Dok	250.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	320.000.000	2 Dok	325.000.000	2 Dok	325.000.000
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lbg	2 Lbg	250.000.000	2 Lbg	250.000.000	2 Lbg	300.000.000	2 Lbg	310.000.000	2 Lbg	310.000.000
2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa												
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	N/A	6 Dok	600.000.000	6 Dok	700.000.000	6 Dok	750.000.000	6 Dok	755.000.000	6 Dok	755.000.000
2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna												
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dok	2 Dok	150.000.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	200.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat												
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	110.000.000
2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga												
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	30 Dok	1.592.797.638	31 Dok	1.704.132.753	32 Dok	1.709.640.287	33 Dok	1.714.531.096	34 Dok	1.773.243.358

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,135	0,13	0,125	0,12	0,115	0,11	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78,71	78,71	78,71	78,72	78,72	78,72	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,37	71,38	71,39	71,40	71,41	71,42	
4	Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan	Angka	4,20	4,20	4,33	4,53	4,60	4,65	
5	Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	Angka	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Angka	68,75	69,2	69,5	69,7	69,9	70	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Angka	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Angka	36	35,9	35,8	35,7	35,6	35,5	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Angka	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78,71	78,71	78,71	78,71	78,72	78,72	
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,37	71,38	71,39	71,40	71,41	71,42	
7	Rasio KDRT	Angka	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase LPM aktif	Angka	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

13. DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang maka Dinas Ketahanan Pangan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang pangan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 568);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, Lembaran Daerah tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173;
24. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang pangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kita Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.]

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Kota Semarang yang

penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah..

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 102 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah membantu Walikota/Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan, Bidang Keamanan Pangan, dan UPTD;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan, dan UPTD;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. penyelenggaraan kerja sama Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan, dan UPTD;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan, dan UPTD;
8. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan, dan UPTD;
9. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

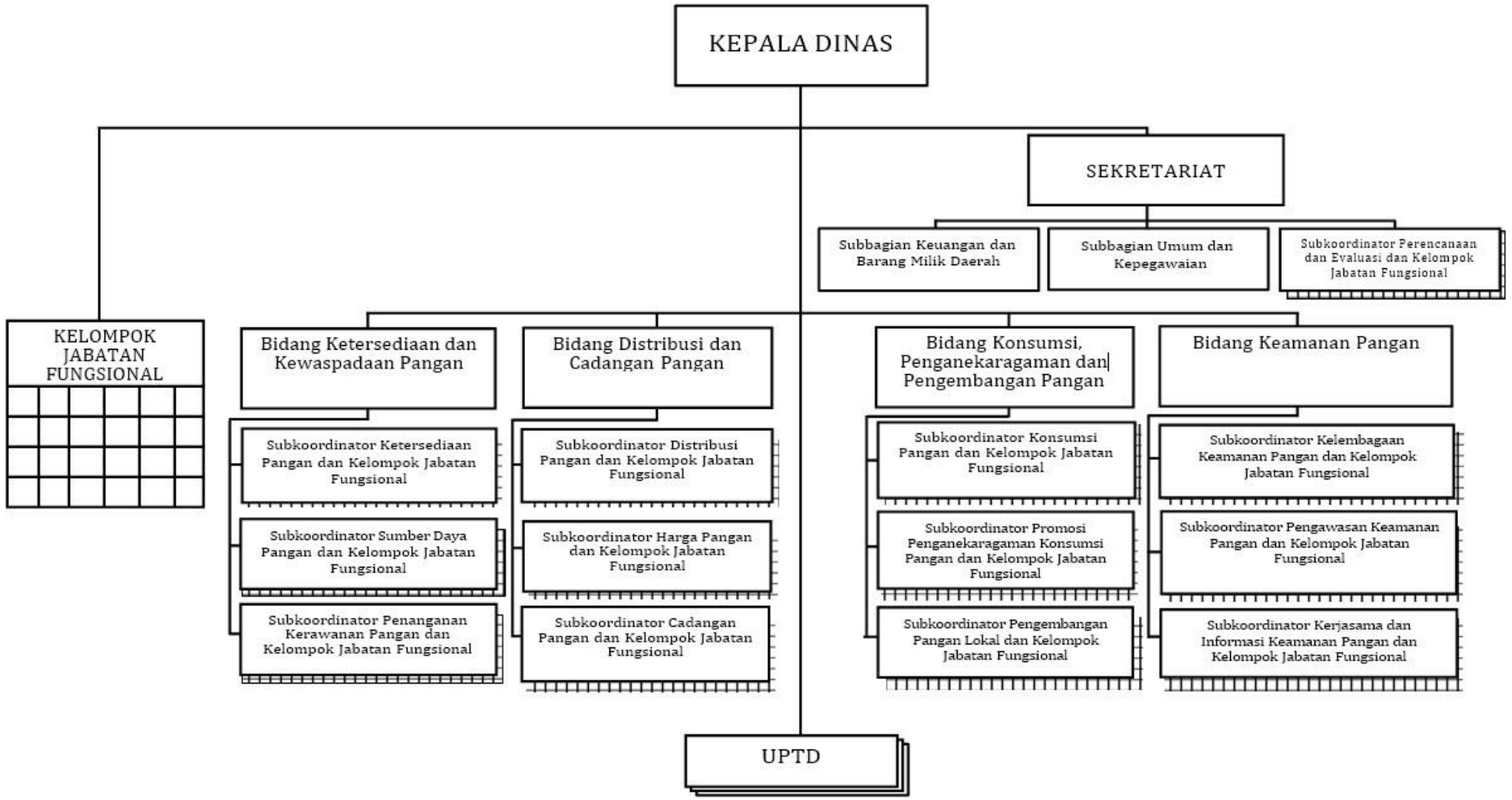

Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
   Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Sekretariat
   Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan. Sekretaris diberikan tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
   a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan, dan UPTD;
   d) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan, dan UPTD;
   e) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   f) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Dinas;
   g) pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Dinas;
   h) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
   i) pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;

j) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
l) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
m) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
n) pelaksaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
o) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
p) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
q) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
r) pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
s) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
t) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
u) pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
v) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
w) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
x) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
y) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
z) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi

Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

3. Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan sebagaimana dimaksud padipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan, dan Penanganan Kerawanan Pangan. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai fungsi:

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
e) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian dan analisa ketersediaan pangan;
f) pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan forum ketahanan pangan;
g) pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan optimalisasi Desa Mandiri Pangan;
h) pelaksanaan kegiatan pola pelatihan pengembangan ketersediaan pangan berbahan baku lokal dan tradisional;
i) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan identifikasi potensi sumberdaya pangan;
j) pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pembinaan optimalisasi warung desa;
k) pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha kelembagaan pangan;
l) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian dan analisa sumberdaya pangan;
m) pelaksanaan kegiatan pembinaan produk pangan berbahan baku lokal;
n) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pola pelatihan sumber daya pangan tradisonal;
o) pelaksanaan bahan penyajian data dan informasi kerawanan pangan dan gizi;
p) pelaksanaan kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kecamatan;
q) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian dan analisa rawan pangan dan gizi dalam rangka pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
r) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pola pelatihan penanganan rentan rawan pangan dan gizi;
s) pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah

rentan rawan pangan sebagai akibat menurunnya gizi dan mutu pangan;

t) pelaksanaan kegiatan fasilitasi upaya penanganan dan penyaluran bantuan pangan untuk kelompok rentan rawan pangan dan gizi;
u) pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan pangan pada rumah tangga rentan rawan pangan dan gizi;
v) pelaksanaan kegiatan pengolahan data penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
w) pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi pengolah data kerentanan dan ketahanan pangan;
x) pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep pendampingan masyarakat rawan pangan di daerah;
y) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan intervensi daerah rentan rawan pangan kronis dan transient;
z) pelaksanaan kegiatan falisilitasi pendampingan masyarakat rentan rawan pangan dan gizi;
aa) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
bb) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
cc) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
dd) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, terdiri atas:

a) Subkoordinator Ketersediaan Pangan;
b) Subkoordinator Sumber Daya Pangan; dan
c) Subkoordinator Penanganan Kerawanan Pangan.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan. Subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
e) pelaksanaan kegiatan identifikasi alur dan pola distribusi pangan;
f) pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep pemasaran bahan pangan;
g) pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya;
h) pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep promosi hasil produksi bahan pangan pokok atau pangan lainnya;
i) pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
j) pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyaluran produksi bahan pangan pokok dan atau bahan pangan lainnya;
k) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat atau Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat;
l) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Harga Pangan;
m) pelaksanaan kegiatan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
n) pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penyediaan informasi harga pangan;
o) pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi intervensi sebagai akibat gejolak harga pasar;
p) pelaksanaan kegiatan analisis data harga pangan;
q) pelaksanaan kegiatan analisis data harga referensi pangan lokal;
r) pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan cadangan pangan daerah;
s) pelaksanaan kegiatan perencanaan pelatihan, bimbingan teknis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kelompok tani;
t) pelaksanaan kegiatan pengembangan penguatan lumbung pangan;
u) pelaksanaan kegiatan penyiapan, pengelolaan dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah;
v) pelaksanaan kegiatan penyusunan analisa cadangan pangan masyarakat;
w) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan analisis hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan cadangan pangan;
x) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
y) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
z) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan

aa) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan), terdiri atas:
a) Subkoordinator Distribusi Pangan;
b) Subkoordinator Harga Pangan; dan
c) Subkoordinator Cadangan Pangan.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan

Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Pengembangan Pangan Lokal. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan mempunyai fungsi :
a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan;
e) pelaksanaan kegiatan survey dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat;
f) pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
g) pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
h) pelaksanaan kegiatan penumbuhan kawasan rumah pangan lestari;
i) pelaksanaan kegiatan pengembangan menu pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman;
j) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan survey dan analisa pola konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi, berimbang dan aman;
k) pelaksanaan kegiatan perencanaan, sosialisasi dan promosi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
l) pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tentang pola konsumsi

pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;

m) pelaksanaan kegiatan identifikasi pengembangan sumber daya pangan lokal;
n) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi pangan lokal;
o) pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan jenis pangan alternatif;
p) pelaksanaan kegiatan identifikasi Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal;
q) pelaksanaan kegiatan penyusunan pola konsumsi pangan berbahan baku lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
r) pelaksanaan kegiatan pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi daerah;
s) pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka memasyarakatkan jenis pangan alternatif;
t) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan;
u) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan;
v) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan; dan
w) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan, terdiri atas:

a.) Subkoordinator Konsumsi Pangan;
b.) Subkoordinator Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
c.) Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan. Subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

6. Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Keamanan Pangan mempunyai

fungsi:

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Keamanan Pangan;
e) pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan rekomendasi sertifikasi pelabelan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
f) pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelembagaan keamanan pangan;
g) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kelembagaan keamanan pangan;
h) pelaksanaan kegiatan pembentukan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah;
i) pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan jajanan anak sekolah;
j) pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan bahan berbahaya produk pangan;
k) pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan fasilitasi sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga;
l) pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan;
m) pelaksanaan kegiatan koordinasi Sistem Keamanan Pangan Terpadu melalui jejaring keamanan pangan;
n) pelaksanaan kegiatan perencanaan pengawasan pencemaran produk pangan segar;
o) pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan prasarana dan sarana pengawasan keamanan pangan segar;
p) pelaksanaan kegiatan pengawasan produk pangan pabrikan dan produk pangan rumah tangga;
q) pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi keamanan pangan;
r) pelaksanaan kegiatan survey keamanan pangan;
s) pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengawas keamanan pangan dan Petugas Pengambil Contoh;
t) pelaksanaan kegiatan uji laboratorium;
u) pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
v) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Keamanan Pangan;
w) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Keamanan Pangan;
x) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Keamanan Pangan; dan
y) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas:
a) Subkoordinator Kelembagaan Keamanan Pangan;
b) Subkoordinator Pengawasan Keamanan Pangan; dan
c) Subkoordinator Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan. Subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

7. UPTD
   Pada Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Jabatan Fungsional
   Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan

2.1.2 Sumber Daya Ketahanan Pangan Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di klasifikasikan berdasarkan pendidikan dan berdasarkan golongan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang per akhir Agustus 2025 sejumlah **53** orang ASN yang terdiri dari 35 orang PNS dan 18 orang P3k. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Tenaga alih daya /outsourcing		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	1	2	2	1	6	0	12
4	D3	0	3	0	0	0	0	3
5	S1	8	12	3	2	0	3	28
6	S2	3	5	0	1	0	0	9
7	S3	0	1	0	0	0	0	1
	Jumlah	**12**	**23**	**5**	**4**	**6**	**3**	**53**

Dari jumlah pegawai sebanyak **53** orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	**Jumlah**
1	Golongan II	9	6	**15**
2	Golongan III	12	19	**31**
3	Golongan IV	2	5	**7**
	Jumlah	**23**	**30**	**53**

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Ketahanan Pangan

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah Bangunan Pasar	800	2022	**Jl.** Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan RT.003 RW.008 Kel.Kalicari Kec.Pedurungan.				Pasar Tlogosari	Tanah Bekas Pasar	544.000.000	13.02.07.03 (Bangunan Kios)

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen			Jl. Supriyadi Kel. Kalicari RT.003 RW.008 Kec.Pedurungan		Belum Bersertifikat	Mutasi	12.460.000
2.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen			Jl. Supriyadi Kel. Kalicari RT.003 RW.008 Kec.Pedurungan		Belum Bersertifikat	Mutasi	172.800.000
3.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen			Jl. Potrosari Kel. Srondol Semarang		Belum Bersertifikat	Pembelian	10.787.835,98

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

a. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Semarang Tahun 2021 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan : Indeks Ketahanan Pangan	-	NA	NA	86,67	86,68	86,90	NA	NA	91,31	92,74		NA	NA	105,35	106,99	
2	Sasaran 1. Persentase Ketersediaan Pangan	%	252,05	252,806	253,563	254,318	255,074	365,64	367,51	409,01	421,94		145,07	145,37	161,31	165,91	
3	2. Pola Pangan Harapan	Skor	88,7	88,8	88,9	91,85	91,86	89,1	91,2	91,8	92,18		100,45	102,7	103,26	100,36	
4	3. Tingkat Keamanan Pangan	%	80	80,5	81	85,62	85,7	91,27	84,6	84,61	87,33		114,09	105,09	104,46	102	
5	4. Nilai AKIP	Skor	77,49	77,50	77,51	77,52	77,53	73,82	73,82	77,75	78,60	79,40	95,26	95,25	100,31	101,39	102,41

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
3	Satuan kinerja	13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun

Rumus rasio adalah : $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	NA	51.762.491	67.405.87	245.048.300		NA	51.714.900	63.643.240	226.178.900		NA	99,91	94,42	92,30		121.405.556	113.845.680
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.321.140.510	5.665.792.397	5.150.248.62	6.835.140.045		2.083.252.621	5.217.725.491	4.857.273.053	6.400.828.514		89,75	92,09	94,31	93,65		4.993.080.395	4.639.769.920
Penanganan Kerawanan Pangan	159.357.970	123.212.864	207.894.58	474.537.209		145.182.020	117.733.520	202.933.360	430.011.910		91,10	95,55	97,61	90,62		241.250.656	223.965.203
Pengawasan Keamanan Pangan	297.768.462	549.707.552	1.679.958.81	2.151.549.319		245.341.035	527.624.033	1.612.852.220	2.056.345.403		82,39	95,98	96,01	95,58		1.169.746.038	1.110.540.673
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	734.224.000	8.305.109.508	9.751.527.42	9.178.837.983		728.759.404	7.796.599.574	8.886.569.256	8.547.277.347		99,26	93,88	91,13	93,12		6.992.424.728	6.489.801.395

Keterangan:

1	Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
3	Anggaran tahun kedua renstra disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
4	Anggaran tahun ketiga renstra disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
5	Anggaran tahun keempat renstra disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
6	Anggaran tahun elima renstra disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keterangan 2-6
7	Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keterangan 7 -11
8	Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun		
9	Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun		
11	Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

c. Kelompok Sasaran Layanan dan Mitra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dalam Pemberian Pelayanan

Pada bagian ini dijelaskan mitra Perangkat Daerah dalam pencapaian tugas fungsi Perangkat Daerah. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan proses bisnis Perangkat Daerah.

Tabel 2.7.
Kelompok Sasaran Layanan Dinas Ketahanan Pangan

NO	JENIS LAYANAN	SASARAN LAYANAN	MITRA LAYANAN
1	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat Kota Semarang	BUMP Purbalingga
2	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat Kota Semarang	BUMP Kendal
3	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat Kota Semarang	BUMP Demak
4	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat Kota Semarang	BUMP Cilacap
5	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat Kota Semarang	BUMP Temanggung
6	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat Kota Semarang	BUMP Grobogan
7	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat Kota Semarang	BUMP Sukoharjo
8	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat Kota Semarang	BUMP Kabupaten Semarang
9	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat Kota Semarang	BUMP Boyolali

d. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pangansekaligus untuk akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Inovasi yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Inovasi Perangkat Daerah

NO	KEGIATAN INOVASI	DISKRIPSI
1	**SEMAR MRANTASI** (Semangat Bergerak Bersama Mewujudkan Kota Semarang Tangguh Pangan dan Gizi)	Sistem analisis ketahanan pangan digital yang mampu memberikan informasi ketersediaan pangan, informasi harga komoditas pangan utama dan informasi lain yang relevan dengan 3 aspek utama ketahanann pangan yakni aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan. Melalui sistem ini diharapkan mempermudah masyarakat maupun Pemangku Kepentingan dalam memanfaatkan, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdapat di Pemerintah Kota Semarang. Sistem analisis ketahanan pangan digital ini menjadi bagian dari sistem data terpadu pada Semarang Satu Data yang diarahkan pada konsep big data serta terintegrasi dengan Satu Data Indonesia (SDI) Link : https://semarmrantasi.semarangkota.go.id/
2	**LUMPANG SEMAR** (Lumbung Pangan Kota Semarang)	Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan penguatan jaringan distribusi pangan melalui Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpangsemar). Lumpangsemar adalah sebuah jaringan distribusi pangan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi terutama pada bahan pokok pangan, mempermudah akses pangan murah, dan menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dalam memenuhi

		kebutuhan pangan masyarakat Lumpangsemar berkolaborasi dengan beberapa offtaker (BUMP, BUMD Pangan, Bulog dan Pelaku Usaha Pangan Lainnya. Sampai dengan April 2024 telah terbentuk 121 Lumpangsemar Kelurahan. Harapan kedepan Lumpangsemar ada di 177 Kelurahan di Kota Semarang.
3	**PAK RAHMAN** (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman)	Merupakan sebuah inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang berbentuk penyelenggaraan pasar pangan murah yang melibatkan stakeholder dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di Kota Semarang untuk mencapai kestabilan harga pangan bagi masyarakat dan menekan inflasi. Hal tersebut dilakukan dengan mempermudah akses pangan murah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang. Dengan mengusung tagline "50-ewu iso blonjo werno-werno", PAK RAHMAN diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Semarang dalam mendapatkan akses pangan murah dan aman.
4	**ATM Beras** (Anjungan Terima Mandiri) Beras	Terobosan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk membantu warga kurang mampu yang terdaftar dalam BDT (Basis Data Terpadu) tetapi belum menerima bantuan Beras Sejahtera (Rasta) maupun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
5	**PISANG LEGI** (Promosi Pangan Lokal Enak & Bergizi)	Inovasi merupakan metode promosi pangan lokal yang dilaksanakan secara komprehensif dari tahap pembuatan bahan dasar, pengolahan, pengemasan hingga pemasaran dilaksanakan dengan semangat kolaboratif multihelix yang ada di Kota Semarang sebagai upaya diversifikasi pangan agar tidak bergantung beras dalam pemenuhan karbohidratnya. Karena "Kenyang Tidak Harus Nasi". Stakeholder yang terlibat antara lain semua OPD, Rumah Sakit, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, PHRI, PPJI, ICA, Organisasi Profesi. Pada puncaknya diadakan even FESTIVAL PENDAMPING BERAS Tingkat Kota Semarang dan akan ditingkatkan menjadi even Tahunan Tingkat Nasional yang akan dijadikan sarana memasyarakatkan konsumsi pangan non beras non terigu dimana semua peserta dari kolaboarsi pentahelix tersebut menyajikan olahan pangan local dan membagi gratis kepada Masyarakat sebagai stimulant Cinta Pangan Lokal.
6	**DETEKTIF PANGAN**	Detektif Pangan merupakan inovasi bidang ketahanan pangan dengan menargetkan siswa Sekolah Dasar (SD) yang terpilih, sebagai pengawas makanan di lingkungan sekolah. Siswa SD yang terpilih sebagai detectif pangan menjadi role model dan melakukan edukasi kepada teman temannya dalam membawa bekal yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Selain itu detectif pangan juga dapat melakukan pengawasan terhadap jajan di sekitar sekolah yang mencurigakan.
7	**GARANGASEM** (Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang)	Adalah Gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya sampah pangan (food waste and food loss) dengan strategi habiskan isi piringmu, stop buang pangan, dan yuk berbagi pangan baik pangan segar maupun pangan olahan.
8	**MATA DEWA** (Pemantauan Kualitas Pangan Dengan Melibatkan Warga)	Sistem pemantauan kualitas pangan yang mengusung semangat kolaborasi multiheliks (Disdag, Dinkes, Disdik, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskominfo, TP-PKK, Kepolisian, TNI, LP2K, LPMK) untuk melakukan pengawasan kualitas dan mutu pangan menggunakan mobil laboratorium untuk sarana pengujian mutu dan kulaitas pangan baik pangan segar maupun pangan olahan yang beredar di masyarakat baik di kantin sekolah, pedagang kaki lima dan keliling, pasar rakyat maupun pasar modern.
9	**DERMAWAN** (Kader Keamanan Waspada Pangan)	Inovasi bersifat kolaboratif dengan menggandeng peran serta masyarakat untuk menjadi Kader Kemanana Waspada Pangan "DERMAWAN" dalam upaya pengawasan dan mutu keamanan pangan yang beredar di masayarakat, baik pangan segar maupun pangan olahan. Kader merupakan anggota PKK Kelurahan yang mewakili Wilayah dan Pedagang Pasar Tradisional sebagai perwakilan Pelaku Usaha Pangan. Kader bertugas Melakukan pengawasan keamanan pangan dan membuat laporan hasil pengawasan keamanan pangan wilayah (kantin sekolah, PKL, Pedagang keliling, toko pusat oleh-oleh) yang diserahkan kembali ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)

e. Penghargaan Perangkat Daerah

Penghargaan yang telah diperoleh Dinas Ketahanan Pangan periode 2021 – 2025 sebagai berikut :

1. Juara I Pengelolaan Data Statistik Sektoral Tahun 2022
2. Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia - Dunia Atas Pendukung Rekor Festival Pendamping Beras Kota Semarang Menuju Daulat Pangan Dengan Varian Terbanyak Oleh 99 Kelompok Tahun 2023
3. Penghargaan Atas Upaya Aktif Dalam Penyelenggaraan Pasar Murah Melalui Pak Rahman (Pasar Pangan Rakyat Murah Dan Aman)
4. Gerakan Pangan Murah Terbaik I Nasional Tahun 2023
5. Produsen Data Sektoral Terbaik Tahun 2023
6. Juara 1 Nasional Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tahun 2023
7. Lokasi Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS Aman) Dengan Rapid Respon Keamanan Pangan Terbaik Nasional Tahun 2024
8. Gerakan Pangan Murah Terbaik II Nasional Tahun 2024
9. Penghargaan sebagai Kontributor Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2022 – 2024
10. Penghargaan Badan Pangan Nasional sebagi Kota Paling Berkomitmen dan Berinisiatif dalam Penyelamatan Pangan Tahun 2024
11. Penghargaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Atas Komitmen Terhadap Pengelolaan Sisa Pangan Tahun 2024
12. Penghargaan Milan Urban Food Policy Pact atas Spreading Experiences and Knowledge on School Meals Programmes in ASEAN Cities Tahun 2025

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Adanya Perubahan Iklim Global
2. Adanya fenomena pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi
3. Pola konsumsi Masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam bergizi seimbang dan aman
4. Adanya masalah gizi ganda (*Double Burden of Malnutrition)*
5. Ketersediaan pangan bergantung dari luar daerah
6. Penggunaan bahan kimia pada pagan segar asal tumbuhan pangan segar asal ikan dan produk hewan
7. Keterbatasan lahan pekarangan Masyarakat untuk pengembangan pangan local yang mendiri
8. Belum adanya tim koordinasi perdagangan antar wilayah

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Letak Kota Semarang di daerah hinterland (daerah penyuplai/pemasok kebutuhan bahan pangan kota)
2. Adanya kebijakan kolaborasi dalam bidang ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan tidur sebagai *urban farming*.
3. Adanya kebijakan optimalisasi sistem logistik daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi distribusi pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk dapat mencakup seluruh penduduk Kota Semarang.
4. Terdapat kebijakan rencana aksi terhadap penurunan *Food Loss and Food Waste* (FLW) untuk menciptakan iklim tranformasi sistem pangan baik dari hulu hingga hilir.
5. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
6. Masih adanya potensi wilayah pinggiran (Mijen, Gunungpati dan Ngaliyan) yang memiliki aktivitas pertanian sehingga dapat dioptimalkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Semarang.
7. Tersedianya pasar tradisional dan pasar modern, yang menyediakan produk pertanian dan perikanan serta sarana prasarana transportasi distribusi pangan yang cukup.
8. Banyak kelompok usaha yang bergerak di bidang olahan pangan memunculkan peluang pengembangan alternatif pangan.
9. Dukungan jaringan Bulog dalam mendukung ketersediaan pangan di Kota Semarang.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Wali Kota Semarang Nomor 102 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, maka dirumuskan

permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yaitu: "Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman / B2SA" yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Rumusan Permasalahan
"Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman / B2SA"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Belum optimalnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya
2.	Belum optimalnya akses pangan bagi masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan
3.	Belum optimalnya konsumsi energi yang berkualitas	Belum optimalnya pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan AKG
4.	Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan	Belum optimalnya pelaksanaan keamanan pangan secara merata
5.	Belum optimalnya kualitas Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan	Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
		Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
   - Belum optimalnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya
   - Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan
2. Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan
   - Belum optimalnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya
3. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan
   - Belum optimalnya pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan AKG
4. Bidang Keamanan Pangan
   - Belum optimalnya pelaksanaan keamanan pangan secara merata
5. Bidang Sekretariat
   - Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
   - Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, untuk mencapai visi Presiden tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari RPJMN Tahun 2025-2029 adalah untuk mendukung visi berupa: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) misi berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia. Sasaran Presiden Republik Indonesia selama periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju
2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mendukung pencapaian sasaran yaitu "Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang".

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Terkait Dinas Ketahanan Pangan adalah masih rendahnya produktivitas.

Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

Produktivitas perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Masyarakat dan pelaku usaha pangan lokal perlu didorong agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan di masa depan, diantaranya: Digitalisasi usaha pada UMKM pangan lokal dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha.

Selain itu, Pengembangan kawasan strategis ekonomi di Kota Semarang diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan adanya rencana pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru maupun peningkatan kawasan strategis yang sudah ada. Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, antara lain:

1. Penanganan Banjir
2. Penguatan Ketahanan Pangan
3. Kota Inklusif
4. Peningkatan Gizi Masyarakat
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang berperan serta dalam penguatan ketahanan pangan di Kota Semarang. Strategi utama dalam upaya penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta optimalisasi pola konsumsi pangan sesuai kaidah B2SA.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”

Visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) pokok visi berikut:

1. Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
2. Pusat Ekonomi yang Berkeadilan dan Inklusif
3. Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
4. Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif

Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi berikut:

1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian;
2. Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi;
3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak;
4. Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital;
5. Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat;
7. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mendukung pencapaian target pembangunan dari pokok visi dan misi ke-3 yaitu “mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak”. Dinas Ketahanan Pangan secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berkualitas, serta meningkatnya keamanan pangan.

Pangan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar berkaitan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pemberdayaan serta perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Sehingga dalam penyusunan kebijakan strategis dan rencana aksi di Dinas Ketahanan Pangan mempertimbangkan dan mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender (PUG), kebutuhan anak, kesejahteraan sosial, dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang juga berupaya untuk terus menyelenggarakan distribusi pangan berkelanjutan yang merata dan

menjangkau seluruh wilayah rawan pangan dan masyarakat miskin. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang juga melaksanakan edukasi dalam rangka mendorong diversifikasi dan penganekaragaman pangan lokal agar sesuai dengan kaidah B2SA. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang juga melaksanakan pengawasan terhadap pangan segar maupun olahan pangan segar, serta memberikan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan keamanan pangan di Kota Semarang.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak seperti melakukan edukasi gizi dan pengawasan keamanan pangan di sekolah dan madrasah, serta mendorong keterlibatan anak dalam kampanye pangan sehat. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam intervensi pencegahan, penanganan dan penurunan angka stunting. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang juga mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dengan kegiatan produksi pangan skala rumah tangga serta bantuan terhadap masyarakat miskin ekstrem.

c. Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional

Telaah tujuan dan sasaran pembangunan Renstra Badan Pangan Nasional belum dapat dianalisis mengingat Renstra Kementerian Pertanian sedang disusun.

d. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Adalah Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan,
2. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan
3. Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan
4. Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Kegiatan prioritas DISHANPAN pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Subsidi Harga Pangan untuk penanganan daerah rawan pangan pada daerah dengan Prevalence of Undernourishment (PoU) tinggi
2. Subsidi Harga Pangan untuk Penanganan stunting di daerah dengan angka stunting tinggi
3. Subsidi harga pangan untuk Produsen dan Konsumen guna untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah yang mengalami inflasi.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Kota Semarang.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Ketahanan Pangan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Ketahanan Pangan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 untuk Kawasan peruntukan pertanian dijabarkan sebagai berikut:

Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 untuk Kawasan peruntukan pertanian dijabarkan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

   Kawasan pertanian tanaman pangan seluas ±2.602 ha merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari ±1.633 ha Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan ± 969 ha Cadangan Lahan Pertanian Pangan. Kawasan ini meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, dan Tugu.

   Adapun rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan adalah sebagai berikut:

   a. Budidaya tanaman pangan;
   b. Peningkatan sistem irigasi; dan
   c. Pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau.

Tabel 2. 10 Indikasi Program yang Berkaitan dengan Dinas Pertanian

No	Program Utama	Lokasi	Waktu	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	Perwujudan Pola Ruang				
	Kawasan Budidaya				
	Kawasan Pertanian				
	- Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Tugu	2020-2030	APBD	Dinas Pertanian
	- Pengembangan kawasan pertanian hortikultura	Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan	2020-2030	APBD	Dinas Pertanian

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Ketahanan Pangan **tidak dapat** mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki

indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan adalah terkait pada Pilar Sosial. Sasaran strategis pada Pilar Sosial meliputi pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan kesehatan, serta meningkatkan pendidikan dan kesetaraan gender. Pada isu kemiskinan, sasaran strategis yang utama adalah peningkatan upaya ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan dan peningkatan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

Tabel 2.11.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan - Masih kurangnya kesetaraan gender - Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dan perempuan	1. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender
Belum optimalnya distribusi kesejahteraan	2. Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah
Masih kurangnya kontribusi sektor terhadap kesejahteraan	
Belum optimalnya dukungan sektor keuangan	
Masih kurangnya dukungan industri hijau	

Tabel 2.12.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Semarang Tahun 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*)	-2	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	5	Strategi: 1. Meningkatkan upaya ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan 2. Meningkatkan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat miskin	Program: 1.a Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 1.b Program peningkatan dan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 2.a Program penanganan kerawanan pangan 2.b Program Pengawasan Keamanan Pangan

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

g. Telaahan Dokumen Lainnya

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:

Tabel 2.13.
Isu Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan global akibat perubahan iklim	Belum optimalnya transformasi sistem pangan menuju kemandirian pangan		Optimalisasi pemenuhan ketersediaan pangan
Lahan produktif di pinggiran kota	Belum optimalnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	Krisis pangan dunia akibat perubahan iklim & geopolitik	Belum optimalnya ketersediaan pangan nasional akibat keterbatasan produksi	Masih adanya ancaman alih fungsi lahan pertanian di kawasan pinggiran kota	Optimalisasi ketersediaan pangan yang berkelanjutan
Infrastruktur distribusi pangan yang relatif baik	Belum optimalnya akses pangan bagi masyarakat	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	Masih adanya fluktuasi harga pangan dunia akibat gangguan rantai pasok	Belum optimalnya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok	Masih adanya keterbatasan distribusi pangan dari pinggiran ke pusat kota	Optimalisasi akses pangan bagi masyarakat
	Belum optimalnya konsumsi energi yang berkualitas	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	Masih adanya perubahan pola konsumsi urban (urban diet shift)	Belum optimalnya diversifikasi pangan berbasis lokal	Belum optimalnya program diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal (umbi, jagung, pisang)	Optimalisasi konsumsi energi yang berkualitas

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya pemenuhan daerah sangat tahan pangan	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	Masih adanya ketimpangan akses pangan antarnegara	Masih adanya daerah dengan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi	Masih adanya daerah rawan pangan di Jawa Tengah yang membutuhkan intervensi	Optimalisasi pemenuhan daerah sangat tahan pangan
	Belum stabilnya harga pangan pokok	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	Masih adanya volatilitas harga pangan global (beras, gandum)	Belum optimalnya pengendalian inflasi pangan nasional	Masih adanya kebutuhan operasi pasar & penguatan Lumpang Semar di Semarang	Stabilisasi harga pangan pokok
	Belum optimalnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan kaidah B2SA	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	Masih adanya tantangan urban diet transition & obesitas	Belum optimalnya kampanye konsumsi pangan B2SA	Masih adanya ketergantungan konsumsi beras di Semarang meskipun potensi pangan lokal tersedia	Optimalisasi kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat sesuai kaidah B2SA
	Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	Masih adanya isu keamanan pangan global	Belum optimalnya pengawasan pangan segar & olahan secara menyeluruh	Masih adanya pangan tidak aman di pasar tradisional dan jajanan anak sekolah	Optimalisasi pengawasan keamanan pangan di pre dan pos market
	Belum optimalnya kualitas Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	Belum optimalnya sistem informasi pangan dunia yang transparan	Belum optimalnya integrasi data ketahanan pangan (Regsosek, SPBE)	Belum optimalnya pemanfaatan sistem digital *Semar Mrantasi* dalam mendukung kebijakan pangan daerah	Optimalisasi kualitas kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang (data diolah)

Keterangan:

1	Potensi kelebihan dari daerah
2	Permasalahan perangkat daerah yang terdapat di tabel 2.7
3	Isu KLHS yang terdapat di tabel 2.8
4	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang bersifat global yang relevan dengan urusan
5	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang level nasional yang relevan dengan urusan
6	Isu yang terdapat dokumen RPJMD Provinsi/Kab/Kota yang relevan dengan urusan
7	Hasil analisis isu strategis urusan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semaranf ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang ketahanan pangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"**Terwujudnya ketangguhan dan ketahanan pangan untuk kemandirian pangan**"

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berkualitas;
2. Meningkatnya keamanan pangan;
3. Meningkatnya kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD: Menurunya beban pengeluaran masyarakat	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menurunnya beban pengeluaran masyarakat			Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	63,37	65,11	66,86	68,61	70,36	72,11	
	Terwujudnya ketangguhan dan ketahanan pangan untuk kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	92.75	74,29	74,30	74,31	74,32	74,33	
		Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berkualitas	Pola Pangan Harapan	Skor	92.19	93.6	39.7	93.8	93.9	94	
		Meningkatnya keamanan pangan	Tingkat Keamanan Pangan	%	87.7	87.80	87.90	88	88.10	88.20	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	Angka	79,4	79,41	79,42	79,43	79,44	79,45	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan	Angka	92,78	92,80	92,85	92,9	92,95	93	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tahapan Strategi
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1. Optimalisasi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	1. Penguatan Pemenuhan Ketersediaan Pangan	1. Peningkatan Pemenuhan Ketersediaan Pangan	1. Pemantapan Pemenuhan Ketersediaan Pangan	1. Perwujudan Pemenuhan Ketersediaan Pangan
2. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok	2. Penguatan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok	2. Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok	2. Pemantapan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok	2. Perwujudan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
3. Optimalisasi pola konsumsi pangan masyarakat sesuai B2SA	3. Penguatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai B2SA	3. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai B2SA	3. Pemantapan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai B2SA	3. Perwujudan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai B2SA
4. Optimalisasi pengawasan keamanan pangan di pre dan pos market	4. Penguatan pengawasan keamanan pangan di pre dan pos market	4. Peningkatan pengawasan keamanan pangan di pre dan pos market	4. Pemantapan pengawasan keamanan pangan di pre dan pos market	4. Perwujudan pengawasan keamanan pangan di pre dan pos market

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Ketahanan Pangan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem terpadu dan terintegrasi dan perlindungan sosial adaptif integratif.	Optimalisasi ketersediaan pangan yang merata	
			Optimalisasi distribusi pangan pokok secara merata	
			Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis	
			Optimalisasi kualitas konsumsi pangan sesuai B2SA	
			Optimalisasi pengawasan keamanan pangan di pre dan pos market	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
Menurunnya beban pengeluaran masyarakat					Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
	Terwujudnya ketangguhan dan ketahanan pangan untuk kemandirian pangan				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		Kepala Dinas
		Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konsumsi Pangan yang berkualitas			Pola Pangan Harapan		Kepala Dinas
			Meningkatnya optimalisasi sumber daya ekonomi lokal dalam menunjang kemandirian pangan		Persentase Kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai	Persentase Kelurahan yanga memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan

				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan	2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Staff
			Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan		Angka ketersediaan energi	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan
			Meningkatnya akes pangan bagi msayarakat		Persentase Cakupan Distribusi Pangan	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
			Meningkatnya Konsumsi Energi yang Berkualitas		Angka Konsumsi Energi	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kepala Bidang Konsumsi P3
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kota Semarang dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Staff
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Staff
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan	2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan	Staff

					Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Staff
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Staff
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Staff
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Staff
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Staff
					Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Staff
				Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Staff
					Jumlah Cadangan Pangan	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Staff

				Meningkatnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Protein	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Staff
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Staff
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Staff
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Subkoordinator Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
			Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan		Persentase daerah tahan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan

			ketersediaan dan akses pangan				
				Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Staff
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Staff
				Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Kelurahan Tahan Pangan	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Staff
					Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Staff
		Meningkatnya Keamanan Pangan			Tingkat Keamanan Pangan		Kepala Dinas
			Meningkatnya peredaran pangan yang aman layak konsumsi dan bebas dari cemaran		Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kepala Bidang Keamanan Pangan
				Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan	Persentase Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pengawasan Keamanan Pangan

				Pangan Segar Kota Semarang			
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pengawasan Keamanan Pangan
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Subkoordinator Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Subkoordinator Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
		Meningkatnya kinerja Dinas Ketahanan Pangan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Dinas

			Ketahanan Pangan				
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staff
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staff
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staff
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staff
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staff

				Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Staff
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staff
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staff
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD

				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
		Meningkatnya kinerja Dinas Ketahanan Pangan			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Dinas

			kinerja Dinas Ketahanan Pangan				
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

				mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan	persentase aduan masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan yang selesai ditindaklanjuti		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

				Operasional atau Lapangan			
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu :

1. Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah
2. Peningkatan bantuan sosial yang berkeadilan
3. Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan dan peternak
4. Peningkatan budaya konsumsi makanan pendamping beras

Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah	Terjaganya stabilitas pasokan dan harga pangan	2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
2	Peningkatan bantuan sosial yang berkeadilan	Terselenggaranya penyaluran bantuan sosial yang adil, tepat sasaran, dan transparan guna	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyaluran Beras Cadangan Pangan Daerah Kota Semarang
			2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pemberian Bantuan Pangan Fortifikasi
3	Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan dan peternak	Meningkatnya konsumsi pangan berbasis potensi pangan local	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelatihan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Diseminasi Pila Pangan Harapan
			2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelatihan dan Edukasi Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal
4	Peningkatan budaya konsumsi makanan pendamping beras	Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.2.

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Urusan Pangan													
2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100%	100%	25.107.496	100%	27.763.760	100%	28.919.889	100%	29.132.254	100%	29.633.178	
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100%	100%	25.107.496	100%	27.763.760	100%	28.919.889	100%	29.132.254	100%	29.633.178	
2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit	25.107.496	1 Unit	27.763.760	1 Unit	28.919.889	1 Unit	29.132.254	1 Unit	29.633.178	
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	3063 Kkal / Kapita / hari	3065 Kkal / Kapita / hari	1.370.360.327	3067 Kkal / Kapita / hari	1.592.415.022	3069 Kkal / Kapita / hari	1.750.000.000	3071 Kkal / Kapita / hari	1.778.946.121	3073 Kkal / Kapita / hari	1.778.946.121	
	Persentase Cakupan Distribusi Pangan	100%	100%	1.301.890.000	100%	1.444.550.681	100%	1.441.894.417	100%	1.341.894.417	100%	1.260.172.323	
	Angka Konsumsi Energi	1895 kkal/kapita/ hari	1910 kkal/kapita/ hari	700.000.000	1920 kkal/kapita/ hari	750.000.000	1930 kkal/kapita/ hari	750.000.000	1940 kkal/kapita / hari	750.000.000	1950 kkal/kapita/ hari	800.000.000	
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan	100%	100%	1.370.360.327	100%	1.592.415.022	100%	1.750.000.000	100%	1.778.946.121	100%	1.778.946.121	
2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	
2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 Laporan	2 Laporan	70.360.327	2 Laporan	82.419.439	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	
2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	NA	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	NA	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	728.946.121	1 Laporan	728.946.121	
2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	NA	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	
2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	44 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	
2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	NA	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	
2.09.03.2.01.013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	NA	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan	100%	100%	1.301.890.000	100%	1.444.550.681	100%	1.441.894.417	100%	1.341.894.417	100%	1.260.172.323	
2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	100 Ton	100 Ton	1.301.890.000	100 Ton	1.444.550.681	100 Ton	1.441.894.417	100 Ton	1.341.894.417	100 Ton	1.260.172.323	

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Protein	NA	60,44 gr/kapita/hari	700.000.000	60,45 gr/kapita/hari	750.000.000	60,46 gr/kapita/hari	750.000.000	60,47 gr/kapita/hari	750.000.000	60,48 gr/kapita/hari	800.000.000	
2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Dokumen	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	200.000.000	
2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Dokumen	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	
2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	NA	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah tahan pangan	100%	100%	199.787.580	100%	220.924.232	100%	230.123.886	100%	231.813.732	100%	235.799.729	
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	99.787.580	2 Dokumen	100.924.232	2 Dokumen	100.123.886	2 Dokumen	100.813.732	2 Dokumen	100.799.729	
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen	2 Dokumen	99.787.580	2 Dokumen	100.924.232	2 Dokumen	100.123.886	2 Dokumen	100.813.732	2 Dokumen	100.799.729	
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Kelurahan Tahan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	131.000.000	1 Dokumen	135.000.000	
2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	131.000.000	1 Dokumen	135.000.000	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	NA	93,60%	1.024.480.824	93,70%	1.132.866.413	93,80%	1.180.040.866	93,90%	1.188.706.143	94	1.209.145.736	
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sertifikasi Keamanan Pangan Segar	NA	93%	1.024.480.824	93,50%	1.132.866.413	94%	1.180.040.866	94,50%	1.188.706.143	95	1.209.145.736	
2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	225.000.000	12 Dokumen	225.000.000	12 Dokumen	225.000.000	12 Dokumen	225.000.000	
2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 Dokumen	100 Dokumen	130.000.000	100 Dokumen	150.000.000	100 Dokumen	197.174.453	100 Dokumen	197.174.453	100 Dokumen	217.614.046	
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	494.480.824	3 Dokumen	557.866.413	3 Dokumen	557.866.413	3 Dokumen	557.866.413	3 Dokumen	557.866.413	
2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	208.665.277	5 Dokumen	208.665.277	
2.09.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.457.805.623		14.983.080.171		15.646.950.651		15.768.894.225		16.056.533.862	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%	8.865.549.286	100	9.866.326.750	100	10.287.143.088	100	10.729.000.242	100	11.192.950.254	
2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja	100%	100%	350.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	
2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
2.09.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100	8.365.549.286	100	8.966.326.750	100	9.387.143.088	100	9.729.000.242	100	10.092.950.254	Subbag Keuangan dan BMD
2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang	44 orang	8.015.549.286	44 orang	8.416.326.750	44 orang	8.837.143.088	44 orang	9.279.000.242	44 orang	9.742.950.254	
2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	250.000.000	12 dokumen	250.000.000	12 dokumen	250.000.000	12 dokumen	250.000.000	12 dokumen	250.000.000	
2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	
2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	50.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	
2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	90	92,5	4.642.256.337	93	5.216.753.421	93,5	5.459.807.563	94	5.139.893.983	94,5	4.963.583.608	
2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Nilai layanan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	N/A	90	250.000.000	91	250.000.000	92	250.000.000	93	250.000.000	94	250.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan	1	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	
2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	
2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	
2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	
2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	
2.09.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	N/A	100	0	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	0	0	1 Unit	550.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	550.000.000	
2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	0	0	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	
2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA	0	0	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	1.242.256.337	100%	1.166.753.421	100%	1.259.807.563	100%	1.259.893.983	100%	1.259.893.983	Subbag Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	242.256.337	12 Laporan	266.753.421	12 Laporan	309.807.563	12 Laporan	309.893.983	12 Laporan	309.893.983	
2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	900.000.000	12 Laporan	950.000.000	12 Laporan	950.000.000	12 Laporan	950.000.000	
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan	100%	100%	1.900.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.280.000.000	100%	1.203.689.625	Subbag Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	180.000.000	1 Unit	180.000.000	
2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	300.000.000	24 Unit	350.000.000	24 Unit	400.000.000	24 Unit	300.000.000	24 Unit	24 Unit	
2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	500.000.000	25 Unit	450.000.000	25 Unit	500.000.000	25 Unit	400.000.000	25 Unit	323.689.625	

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	500.000.000	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	92.75	74,29	74,30	74,31	74,32	74,33	
2	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92,19	92,2	92,21	93,8	92,22	92,24	
3	Tingkat Keamanan Pangan	%	88	88,5	89	89,5	90	90,5	

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	107,5	107,75	108	108,25	108,5	108,75	
2	Angka Ketersediaan Energi	Kkal / Kapita / hari	3065	3066	3067	3069	3071	3073	
3	Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/ hari	1900	1910	1920	1930	1940	1950	
4	Persentase daerah tahan pangan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	94	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pangan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Permasalahan sektor ketahanan pangan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Ketahanan Pangan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas ketahanan Pangan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas untuk meningkatkan daya saing sektor ketahanan pangan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang lingkungan hidup, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Salinan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054;

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

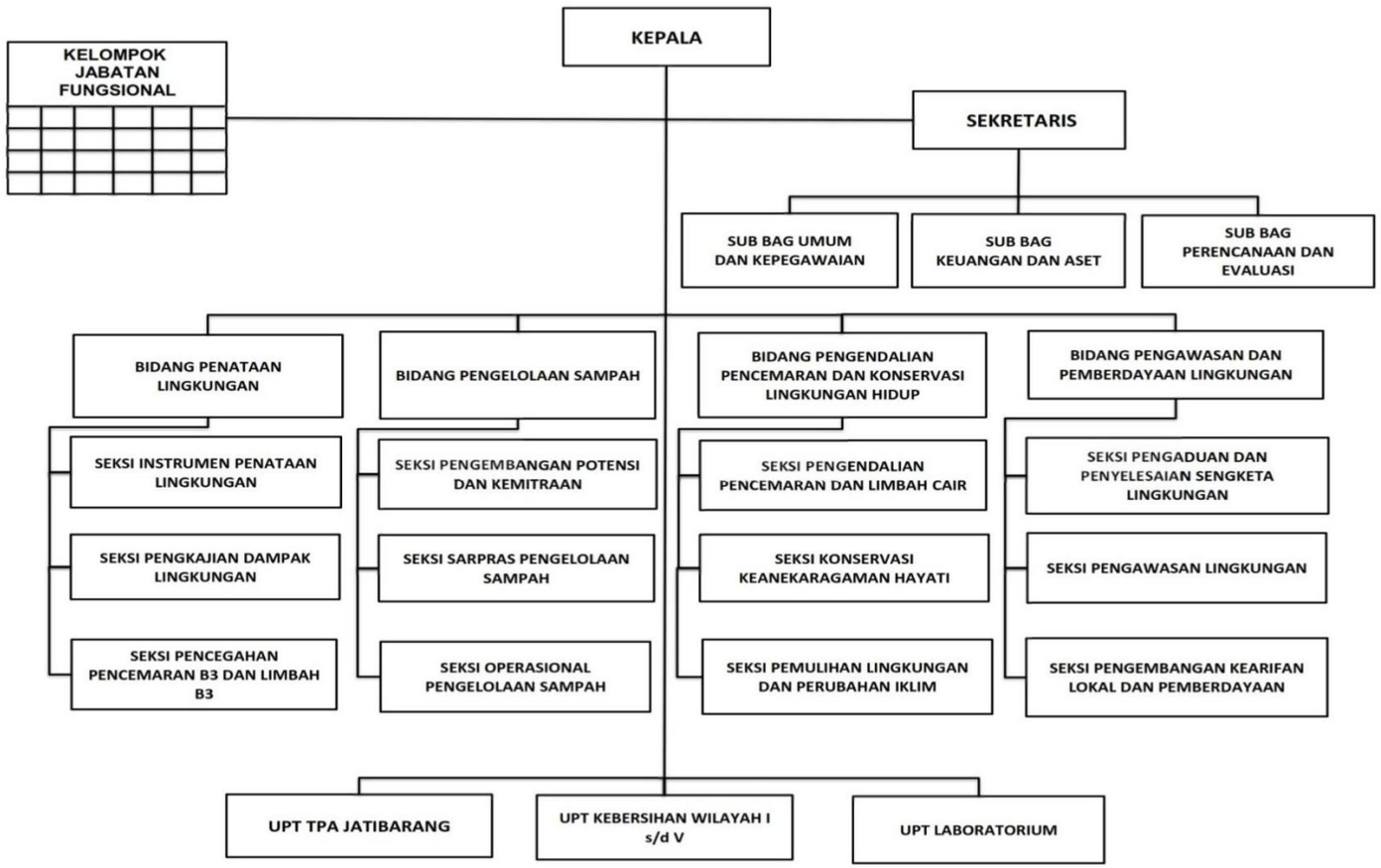

a. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
   Tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Sekretariat
   Tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD. Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas
      - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
      - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
      - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
      - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
      - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
      - menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
      - menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
      - menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
      - menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
      - menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
      - menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
      - melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
      - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
   b. Subbagian Keuangan dan BMD, mempunyai tugas
      - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;

- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
- menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

- menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan Lingkungan, mempunyai fungsi
   - perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   - pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   - pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
   - pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Kriteria Analisis Dampak Lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
   - pelaksanaan kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
   - pelaksanaan kegiatan inventarisasi cadangan sumber daya alam;
   - pelaksanaan kegiatan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem; pelaksanaan kegiatan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk penyusunan evaluasi kebijakan;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Rencana dan Program;
   - pelaksanaan kegiatan pemetaan muatan dan penyusunan Peraturan tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
   - pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana
   - Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan peta Ekoregion;

- pelaksanaan kegiatan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan pemetaan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan penilaian Analisis Dampak Lingkungan, dokumen pengelolaan dan pengkajian lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
- pelaksanaan kegiatan proses penerbitan ijin lingkungan;
- pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
- pelaksanaan kegiatan pemetaan sumber penghasil limbah B3;
- pelaksanaan kegiatan pemetaan pihak pengumpul limbah B3;
- Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- pelaksanaan kegiatan penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan B3;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan perizinan bagi pengumpul limbah B3 meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan skala kota;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan investasi dalam usaha pengumpulan B3 dan limbah B3 skala kota;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengumpulan B3 yang dilaksanakan oleh pihak lain badan usaha;
- pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengembangan potensi kemitraan dan retribusi bidang pengumpulan B3 dan limbah B3;
- pelaksanaan kegiatan penyajian data dan informasi pengembangan potensi, kemitraan dan retribusi bidang pengumpulan B3 dan Limbah B3;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi pengumpulan B3 dan limbah B3;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- pelaksanaan kegiatan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengumpulan B3 dan limbah B3 tingkat kota;
- pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengumpulan B3 dan Limbah B3;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Penataan Lingkungan Hidup;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Sub Koordinator Instrumen Penataan Lingkungan, mempunyai tugas
   - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Instrumen Penataan Lingkungan;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Instrumen Penataan Lingkungan;
   - menyiapkan kegiatan pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan instrumen pencegahan pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Kriteria Analisis Dampak Lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
     - menyiapkan kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
     - menyiapkan kegiatan inventarisasi cadangan sumber daya alam;
     - menyiapkan kegiatan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem;
     - menyiapkan kegiatan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
     - menyiapkan kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk penyusunan evaluasi kebijakan;
     - menyiapkan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Rencana dan Program;
     - menyiapkan kegiatan pemetaan muatan dan penyusunan Peraturan tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
     - menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
     - menyiapkan kegiatan penyusunan peta Ekoregion;
     - menyiapkan kegiatan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
     - menyiapkan kegiatan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
     - menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Instrumen Penataan Lingkungan;
     - menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Instrumen Penataan Lingkungan;
     - menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Instrumen Penataan Lingkungan;

- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pengkajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengkajian Dampak Lingkungan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengkajian Dampak Lingkungan;
- menyiapkan kegiatan pemetaan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- menyiapkan kegiatan penilaian Analisis Dampak Lingkungan, dokumen pengelolaan dan pengkajian lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
- menyiapkan kegiatan proses penerbitan;
- menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengkajian Dampak Lingkungan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengkajian Dampak Lingkungan;
- menyiapkan kegiatan monitoring evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3, mempunyai tugas
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3;
- menyiapkan kegiatan pemetaan sumber penghasil limbah B3;
- menyiapkan kegiatan pemetaan pihak pengumpul limbah B3;
- menyiapkan kegiatan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- menyiapkan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
- pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- menyiapkan kegiatan penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan B3;

- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan perizinan bagi pengumpul limbah B3 meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan skala kota;
- menyiapkan kegiatan pengembangan investasi dalam usaha pengumpulan B3 dan limbah B3 skala kota;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengumpulan B3 yang dilaksanakan oleh pihak lain badan usaha; menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengembangan potensi kemitraan dan retribusi bidang pengumpulan B3 dan limbah B3;
- menyiapkan kegiatan penyajian data dan informasi pengembangan potensi, kemitraan dan retribusi bidang pengumpulan B3 dan Limbah B3;
- menyiapkan kegiatan pengembangan teknologi pengumpulan B3 dan limbah B3;
- menyiapkan kegiatan penyusunan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- menyiapkan kegiatan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- menyiapkan kegiatan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- menyiapkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengumpulan B3 dan limbah B3 tingkat kota;
- menyiapkan kegiatan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengumpulan B3 dan Limbah B3;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pencegahan, Pencemaran B3 dan Limbah B3;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, mempunyai fungsi
   - perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   - Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   - pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah;
   - pelaksanaan kegiatan pengkajian pengelolaan sampah sesuai karakter wilayah;
   - pelaksanaan kegiatan pengembangan kajian teknologi pengolahan sampah;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan pembatasan, pendaur- ulangan dan pemanfaatan kembali sampah tingkat kota;

- pelaksanaan kegiatan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pengembangan potensi pelayanan kebersihan kepada masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
- pengendalian pengembangan potensi kemitraan dan retribusi pengelolaan sampah;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan perizinan pendaurulangan sampah atau pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- pelaksanaan kegiatan perizinan pendaurulangan sampah atau pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- pelaksanaan kegiatan pembinaan danpengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh badan usaha dan masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kerjasama dengan badan usaha dan daerah lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemasaran produk hasil pemanfaatan sampah oleh masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan;
- pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi pelaporan pengembangan potensi kemitraan dan retribusi bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kajian dan pengembangan obyek retribusi;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan retribusi bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana pengelolaan sampah tingkat kota meliputi kendaraan pengangkut sampah dan peralatan;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana pengelolaan sampah tingkat kota meliputi tong sampah, bank sampah, Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan Tempat Pembuangan Akhir;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah tingkat masyarakat meliputi bank sampah, Komposter, dan Biodigester;
- pelaksanaan kegiatan penetapan lokasi bank sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kota;

- pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir, menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah;
- pelaksanaan kegiatan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah skala kawasan dan atau skala kota;
- pelaksanaan kegiatan pemrosesan akhir sampah skala kota;
- pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap petugas Tempat Pemrosesan Akhir dan pemulung;
- pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pengelolaan Sampah;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuanganBidang Pengelolaan Sampah;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dankegiatan Bidang Pengelolaan Sampah; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Sub Koordinator Pengembangan Potensi dan Kemitraan, mempunyai tugas
   - Penyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Potensi dan Kemitraan;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengembangan Potensi dan Kemitraan;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah;
   - menyiapkan kegiatan pengkajian pengelolaan sampah sesuai karakter wilayah;
   - menyiapkan kegiatan pengembangan kajian teknologi pengolahan sampah;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pembatasan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah tingkat kota;
   - menyiapkan kegiatan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
   - menyiapkan kegiatan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pengembangan potensi pelayanan kebersihan kepada masyarakat;
   - menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengembangan potensi kemitraan dan retribusi pengelolaan sampah;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan perizinan pendaurulangan sampah atau pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- menyiapkan kegiatan perizinan pendaurulangan sampah atau pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh badan usaha dan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan kerjasama dengan badan usaha dan daerah lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemasaran produk hasil pemanfaatan sampah oleh masyarakat;
- menyiapkan kegiatan penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan;
- menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi pelaporan pengembangan potensi kemitraan dan retribusi bidang lingkungan hidup;
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan kajian dan pengembangan obyek retribusi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan retribusi bidang lingkungan hidup;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengembangan, Potensi dan Kemitraan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengembangan Potensi dan Kemitraan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi dan Kemitraan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
- menyiapkan kegiatan penyediaan sarana pengelolaan sampah tingkat kota meliputi kendaraan pengangkut sampah dan peralatan;
- menyiapkan kegiatan penyediaan prasarana pengelolaan sampah tingkat kota meliputi tong sampah, bank sampah, Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan Tempat Pembuangan Akhir;
- menyiapkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- menyiapkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah tingkat masyarakat meliputi bank sampah, Komposter, dan Biodigester;

- menyiapkan kegiatan penetapan lokasi bank sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Operasional Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas
- Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional Pengelolaan Sampah;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Operasional Pengelolaan Sampah;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kota;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir, menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah;
- menyiapkan kegiatan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- menyiapkan kegiatan pengolahan sampah skala kawasan dan atau skala kota;
- menyiapkan kegiatan pemrosesan akhir sampah skala kota;
- menyiapkan kegiatan pembinaan terhadap petugas Tempat Pemrosesan Akhir dan pemulung;
- menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Operasional Pengelolaan Sampah;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Operasional Pengelolaan Sampah;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:
- perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi, dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- pelaksanaan kegiatan pelaksanaan perizinan pendaurulangan atau pengolahan limbah cair, pengangkutan limbah cair dan pemrosesan akhir limbah cair yang diselenggarakan oleh swasta;
- pelaksanaan kegiatan penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan limbah cair;
- pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan limbah cair yang dilaksanakan oleh badan usaha dan masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan limbah cair tingkat masyarakat dan sentra Usaha Kecil Mikro meliputi Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Biogas;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan limbah cair domestik;
- pelaksanaan kegiatan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair industri dan jasa;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan limbah cair;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan data profil pencemaran lingkungan;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan limbah cair;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan profil keanekaragaman hayati tingkat kota;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- pelaksanaan kegiatan penetapan lokasi keanekaragaman hayati dan kawasan esensial;
- pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan kawasan keanekaragaman hayati dan kawasan esensial;
- pelaksanaan kegiatan konservasi dan pencadangan sumber daya alam;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan indeks efektifitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan keanekaragaman hayati;
- pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyusunan Analisa Kerentanan Adaptasi perubahan iklim;
- pelaksanaan kegiatan penurunan emisi Gas Rumah Kaca;
- pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan kota dan masyarakat terhadap perubahan iklim;
- pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan Program Kampung Iklim;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair, mempunyai tugas:
   - Penyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
   - menyiapkan kegiatan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
   - menyiapkan kegiatan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
   - menyiapkan kegiatan pelaksanaan perizinan pendaurulangan atau pengolahan limbah cair, pengangkutan limbah cair dan pemrosesan akhir limbah cair yang diselenggarakan oleh swasta;
   - menyiapkan kegiatan penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan limbah cair;
   - menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan limbah cair yang dilaksanakan oleh badan usaha dan masyarakat;
   - menyiapkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan limbah cair tingkat masyarakat dan sentra Usaha Kecil Mikro meliputi Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Biogas;
   - menyiapkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan limbah cair domestik;
   - menyiapkan kegiatan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair industri dan jasa;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan limbah cair;

- menyiapkan kegiatan penyusunan data profil pencemaran lingkungan;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan limbah cair;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan;dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati, mempunyai tugas
   - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Konservasi Keanekaragaman Hayati;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
   - menyiapkan kegiatan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan profil keanekaragaman hayati tingkat kota;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
   - menyiapkan kegiatan penetapan lokasi keanekaragaman Hayati dan kawasan esensial;
   - menyiapkan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
   - menyiapkan kegiatan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan kawasan keanekaragaman hayati dan kawasan esensial;
   - menyiapkan kegiatan konservasi dan pencadangan sumber daya alam;
   - menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyusunan indeks efektifitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan keanekaragaman hayati;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Konservasi Keanekaragaman Hayati;
   - menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
   - menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
   - melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim, , mempunyai tugas
   - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim;
   - menyiapkan kegiatan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   - menyiapkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   - menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyusunan Analisa Kerentanan Adaptasi perubahan iklim;
   - menyiapkan kegiatan pelaksanaan penurunan emisi Gas Rumah Kaca;
   - menyiapkan kegiatan pelaksanaan peningkatan ketahanan kota dan masyarakat terhadap perubahan iklim;
   - menyiapkan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
   - menyiapkan kegiatan pengembangan Program Kampung Iklim;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim;
   - menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim;
   - menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim;
   - melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, mempunyai fungsi
   - perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   - pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   - pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan dan sosialisasi tata cara, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan penyelesaian sengketa;
   - pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan Lingkungan;

- pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- pelaksanaan kegiatan pemetaan usaha terkait izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat pendukung kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan badan usaha dan masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping kelompok masyarakat dan penilai penghargaan lingkungan hidup;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan;

a. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, mempunyai tugas
   - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan dan sosialisasi tata cara, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan penyelesaian sengketa;
   - menyiapkan kegiatan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan Lingkungan;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
   - menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
   - menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pengawasan Lingkungan, mempunyai tugas
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengawasan Lingkungan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengawasan Lingkungan;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- menyiapkan kegiatan pemetaan usaha terkait izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengawasan Lingkungan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengawasan Lingkungan;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Lingkungan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan, , mempunyai tugas
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- menyiapkan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat pendukung kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- menyiapkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan badan usaha dan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- menyiapkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;

- menyiapkan kegiatan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- menyiapkan kegiatan pengembangan jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping kelompok masyarakat dan penilai penghargaan lingkungan hidup;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPTD, terdiri atas
   a. UPTD Laboratorium Lingkungan;
   b. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir;
   c. UPTD Kebersihan Wilayah I;
   d. UPTD Kebersihan Wilayah II;
   e. UPTD Kebersihan Wilayah III; dan
   f. UPTD Kebersihan Wilayah IV.
8. Jabatan Fungsional
   Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No.	Jabatan	S3		S2		S1/D4		D3		SMA		SMP		SD		Jumlah (orang)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Eselon II (b)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III (a)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Eselon III (b)	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4.	Eselon IV (a)	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
5.	Eselon IV (b)	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
6.	Staff PNS	-	-	-	-	8	12	2	5	20	1	9	-	5	-	62
7.	Staff PPPK	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		**1**	**0**	**5**	**7**	**14**	**13**	**3**	**6**	**20**	**1**	**9**	**0**	**5**	**0**	**84**

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DLH Kota Semarang, 2024

Tabel 2.2
Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No.	Bidang / UPT	S2		S1/D4		D1		D3		SMA		SMP		SD		Jumlah (orang)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Sekretariat	-	-	6	7	-	-	2	-	14	2	2	-	-	-	33
2.	Penataan Lingkungan	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
3.	Pengelolaan Sampah	1	-	14	11	1	-	4	1	64	10	23	5	17	8	159
4.	Pengendalian Pencemaran & Konservasi	-	-	3	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
5.	Pengawasan & Pemberdayaan Lingkungan	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6.	Kebersihan & Pengelolaan Sampah Wilayah I	-	-	5	-	-	-	-	-	25	-	4	-	2	-	36
7.	Kebersihan & Pengelolaan Sampah Wilayah II	-	-	1	2	-	-	-	-	17	1	6	-	-	-	27
8.	Kebersihan & Pengelolaan Sampah Wilayah III	-	-	1		-	-	-	1	16	-	5	-	-	-	23
9.	Kebersihan & Pengelolaan Sampah Wilayah IV	-	-	2	3	-	-	-	-	16	-	2	-	4	-	27
10.	Tempat Pemrosesan Akhir	-	-	1		-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	7
11.	Laboratorium	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
Jumlah		**1**	**1**	**41**	**34**	**1**	**0**	**6**	**1**	**159**	**13**	**42**	**5**	**24**	**8**	**337**

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DLH Kota Semarang, 2024

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Swakelola Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Bidang/ UPT	S2		S1/D4		D3		SMA		SMP		SD		Jumlah (orang)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Sekretariat	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5
2.	Penataan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pengelolaan Sampah	-	-	2	5	3	2	75	19	13	3	10	8	140
4.	Pengendalian Pencemaran & Konservasi	-	-	4	4	-	-	3	-	2	-	1	-	14
5.	Pengawasan & Pemberdayaan Lingkungan	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5
6.	Kebersihan & Pengelolaan Sampah Wilayah I	-	-	1	-	-	-	11	-	4	-	5	-	21
7.	Kebersihan & Pengelolaan Sampah Wilayah II	-	-	1	-	-	-	20	-	3	-	2	-	26
8.	Kebersihan & Pengelolaan Sampah Wilayah III	-	-	-	-	-	-	13		6	-	4	-	23
9.	Kebersihan & Pengelolaan Sampah Wilayah IV	-	-	1	-	-	-	10		6	1	2	-	20
10.	Tempat Pemrosesan Akhir	-	-	2	5	-	-	20	4	3	-	4	1	39
11.	Laboratorium	-	-	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	7
Jumlah		**0**	**0**	**16**	**18**	**5**	**2**	**156**	**24**	**37**	**4**	**29**	**13**	**300**

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DLH Kota Semarang, 2024

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Aset Tanah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Sawah Irigasi	1.869	1976	Jl. Tapak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu	Hak Pakai	23/08/ 2007	HP 37	Sawah	Pembelian	158.400	Ex-Bengkok 50.16.02.00
2	Tanah Bangunan Industri Bengkel	6.776	2009	Jl. Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu	Hak Pakai			UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah IV	Pembelian	2.034.300	Hasil Penilaian Tahun 2009 (Kantor UPT IV) Kantor UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah IV DLH Kota Semarang
3	Tanah Bangunan Industri Bengkel	4.062	2009	Jl. Tirto Agung Barat V Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik	Hak Pakai			UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah III	Pembelian	2.856.700	hasil Penilaian Tahun 2009
4	Tanah Bangunan Industri Bengkel	5.834	2009	Jl. Muktiharjo Raya, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari	Hak Pakai			UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah II	Pembelian	3.272.100	hasil Penilaian Tahun 2009
5	Tanah Hutan lainnya	40.664	2019	Hutan Gunung Talang, Kelurahan Bendan Duwur Kec. Gajahmungkur	Hak Pakai			Hutan Kota Gunung Talang	Hibah	24.967.696	Penguasaan Tanah Dengan Berita Acara Nomer 030/1271 di Kelurahan Bendan Duwur Kec. Gajahmungkur

Tabel 2.5
Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	882	Jl. Tapak Kel. Tugurejo Kec. Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	4.569.125,665
2	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	120	Jl. Tapak Kelurahan Tugurejo Kec. Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	41.525
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	100	Jalan Sawah Besar XV No. 15 Kelurahan Kaligawe Gayamsari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	184.590
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	1.000	Jalan Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	540.401,91
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Supriyadi 30 Kelurahan Kalicari Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	277.928
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	150	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	561.366,2
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	500	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	43.100
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	120	Jalan Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	86.100
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	224	Jl. Tapak Kel.Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	272.124
10	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	100	Jl. Tirto Agung Barat V Pedalangan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	97.260,853
11	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	100	Jl. Tapak Tugurejo Kecamatan Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	430.627,932

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
12	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	100	Jl. Muktiharjo Raya Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.700
13	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	200	Jl. Tirto Agung Pedalangan Banyumanik (UPTD KEBERSIHAN WILAYAH III)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	66.100
14	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	155	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	4.000
15	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	144	Jl. Tapak Tugurejo Kec.Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	57.900
16	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	378	Jl. Tirto Agung Barat V Kelurahan Pedalangan Kec. Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	176.700
17	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	192	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	69.700
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	450	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	147.015
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	100	Jl. Plamongan Larasati Raya Kel. Pedurungan Kidul (TK Negeri Pedurungan)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.065
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	100	Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.065
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	150	Jalan Tapak Tugurejo Tugu Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	193.930
22	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	20	Jl. Tapak Kel. Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	25.666,46
23	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	30	Jl. Tapak Kel. Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	208.415

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	332	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.515.102
25	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Baik	15	Jl. Tapak Kel. Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	21.398,693
26	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Baik	20	Jl. Tapak Kel. Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	21.568,489
27	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	24	Jl. Tapak Kel. Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.285,74
28	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	15	Jl. Tapak Kel. Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	23.477
29	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jalan Muktiharjo Raya Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	263.534,437
30	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	100	Jalan Borobudur Selatan Kelurahan Manyaran		Tanah Milik Pemda	Pembelian	170.100,65
31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Kelurahan Karanganyar Gunung Candisari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	597.077
32	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Baik	15	Jl. Tapak Kel. Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	97.167,926
33	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	412	Kel. Bulusan Kec. Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	162.414,8
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	100	Jalan Rasamala Raya, Kelurahan Srondol Wetan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	39.756,255
35	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	100	Jl. Parikesit Raya Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	136.563,115
36	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	150	Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan (Kantor Kelurahan Tambakaji)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	22.486,63
37	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	Baik	180	UPTD TPA Jatibarang , Jl. Untung suropati Kel. Kedungpane Kec. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	258.169

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Kelurahan Penggaron		Tanah Milik Pemda	Pembelian	41.883,545
39	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Jl. Kapten Laut Wiranto Kelurahan Tanjung Mas Kelurahan Banjarharjo Kecamatan Semarang Utara		Tanah Milik Pemda	Pembelian	29.452,417
40	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jl. Ronggowarsito No.90, Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah		Tanah Milik Pemda	Pembelian	29.071,367
41	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Jalan Plamongan Larasati Raya Kelurahan Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	373.207,894
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	155.247,881
43	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Jalan Jatisari baru IV RT 04 RW 03 Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	103.060,225
44	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Kelurahan Bulusan Kec Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	209.613,644
45	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Jalan Mundur Baru I Kel. Sambiroto Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	204.490,728
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Jalan Kedungmundu Sambiroto Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	27.711,357
47	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Jl Sri Rejeki Dalam Raya Kelurahan Kalibanteng Kidul, Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.292,4729
48	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Kelurahan Tugurejo Kec Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	20.6372,724
49	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Jl. Damar Terusan Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	51.439,755

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Kec Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan (Belakang Lapangan Kecamatan Ngaliyan)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	51.116,533
51	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	182	Jl. Tapak Tugurejo Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.545.112
52	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	120	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	867.462,212
53	Pagar Permanen	Baik	1.136	JL. Tapak Kel.Tugurejo Kec. Tugu Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	826.420,769
54	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	44.000	Jl. Untung Suropati Kel. Kedungpane Kec. Mijen (UPT TPA)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	201.621,795
55	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jalan Dong Biru Kelurahan Genuksari Kec. Genuk		Tanah Milik Pemda	Pembelian	55.842,987
56	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jalan Muktiharjo Dalam Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	230.704,828
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Jalan Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kec. Mijen (UPTD TPA)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	202.374,925
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jl. Gaharu Raya, Srondol Wetan, Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.199,506
59	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jalan Sembungharjo Rt 5 Rw 5 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genukf		Tanah Milik Pemda	Pembelian	166.993,709
60	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Waduk Jatibarang Gunung pati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	196.818,756
61	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jalan Pedurungan Tengah VI Kelurahan Palebon Kec Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	202.028,776
62	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	20	Jl. Ungaran Timur Raya Kelurahan Wonotingal Candisari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	52.715

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
63	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	20	Jl. Tapak Tugurejo Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.800
64	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik	1.134	Jl. Tapak Tugurejo Kecamatan Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	137.962,6
65	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	100	Jl. Untungsuropati Kelurahan Kedungpane Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	204.602,831
66	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	180	Jl. Untungsuropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	197.033,385
67	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Untungsuropati Kelurahan Kedungpane Mijen (UPTD TPA JATIBARANG)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.352.346,785
68	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	22	Jl. Sugriwo VI Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	149.925
69	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	48	Jl. Tapak Tugurejo Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	96.258
70	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	36	Jl. Kandri, Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	75.825
71	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	15	Gedung BLH Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	187.719,8
72	Pagar Permanen	Baik	100	Jl. Untungsuropati Kel. Kedungpane Kec. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	205.332,968
73	Pagar Permanen	Baik	150	Jl. Untungsuropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	394.443,936
74	Pagar Permanen	Baik	180	Jl. Supriyadi 30 Kelurahan Kalicari Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	175.701,672
75	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	180	Jl. Tapak Tugurejo Kecamatan Tugu (UPTD Kebersihan Wilayah IV)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	70.875,925

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	898.967,827
77	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Baik	187	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.043,575
78	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Baik	16	Jl. Jodipati Timur Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat (Taman Hutan Kota Krobokan)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	148.092
79	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	44	Kel. Plalangan RT 04/RW 01 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	91.487
80	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	18	Jl. Plamongansari V Kel. Plamongansari Kecamatan Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	74.898
81	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	20	Jl. Abdurahman Saleh Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	148.747
82	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	18	Jl. Brantas Raya Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	149.675
83	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	20	Jl. Kurantil Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	150.320
84	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	150	Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	47.585,738
85	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	150	Jl. Gemah Barat Kel. Gemah Kec Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	249.930,823
86	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	Baik	15	Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	188.353,4

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
87	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	Baik	15	Jl. Ungu Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik (TPU Bangunharjo)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	165.000
88	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	Baik	15	SMP N 31 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	167.741
89	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	200	Jl. Yos Sudarso Tawangsari Kec. Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	227.118,182
90	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	150	Jalan Wilis Kelurahan Tegalsari Kec. Candisari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	138.936,825
91	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	24	Kel. Genuksari Kec Genuk		Tanah Milik Pemda	Pembelian	141.050,841
92	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	100	Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	394.565,8
93	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	150	Jl. Gang 2 Sodong Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.806,654
94	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	54	Jl. Tapak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	210.929,4
95	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Kelurahan Jabungan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	186.411,643
96	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	100	Kel. Rowosari Kecamatan Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	182.589,557
97	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	150	Kel. Rowosari Kecamatan Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	4.130.602,598
98	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	Baik	100	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	199.577,022
99	Pagar Permanen	Baik	74,1	Jl. Tapak Tugurejo Kec. Tugu Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	121.318,2
100	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	12	Obyek Wisata Taman Marga Satwa Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	67.709,627
101	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	59,02	Jl. Tapak Tugurejo Tugu Semarang			Pembelian	67.709,627

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
102	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	28	Kelurahan Manyaran Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	60.829,23
103	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	28	Kelurahan Manyaran Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	60.856,719
104	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	28	Kelurahan Manyaran Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	118.797,932
105	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	84	Kelurahan Purwosari Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	204.391,8
106	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	78	Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	142.584,225
107	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	84	Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk		Tanah Milik Pemda	Pembelian	189.905,2
108	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	90	Jl. Untung Suropati Kel. Kedungpane Kec. Mijen			Pembelian	169.524,939
109	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	Baik	120	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)			Pembelian	103.601,633
110	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	Baik	10	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)			Pembelian	13.927,615
111	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	12	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)			Pembelian	199.376,634
112	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	120				Pembelian	19.399,524
113	Pagar Permanen	Baik	120	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (IPAL Leachte TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	200.311,938
114	Pagar Permanen	Baik	120	Jl. Untung Suropati Kel. Kedungpane Kec. Mijen			Pembelian	33.823,056
115	Pagar Permanen	Baik	85	Jl. Untung Suropati Kel. Kedungpane Kec. Mijen UPTD TPA JATIBARANG			Pembelian	83.505
116	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	50	Jalan Tirto Agung Barat V No. 9 Pedalangan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	545.145,182

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
117	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	96	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	405.307,266
118	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	506,48	UPT Kebersihan Wilayah dan Pengelolaan Sampah Wil.II, Jl. Muktiharjo Raya No.3		Tanah Milik Pemda	Pembelian	742.973,06
119	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	541	Jl. Tapak Tugurejo Kecamatan Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	78.641,002
120	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	96	Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	198.566,542
121	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	17,5	Jl. Jobrang Buntu I Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	169.281,216
122	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	74	Jl. Tugurejo Timur XII Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	284.772,539
123	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	156,87	Jl. Anggraini Raya Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara		Tanah Milik Pemda	Pembelian	86.239,145
124	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	91.8	TPST Lokasi I (Jl. Wilis) Kel. Tegalsari Kecamatan Candisari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	198.500,458
125	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	56,27	Jl. Lingkar Tanjung Panggung Lor Kec. Semarang Utara		Tanah Milik Pemda	Pembelian	284.470,877
126	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	54	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	205.651,793
127	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	238,02	Jl. Tapak Tugurejo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	514.537,372
128	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	Baik	295	Jl. Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	195.194,982
129	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	Baik	144	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	136.615,462

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
130	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	Baik	2.940	Jl. Tapak Tugurejo Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.207.265,178
121	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Baik	127,5	Jl. Untung Suropati Kel. Kedungpane Kec. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	196.832,187
122	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Baik	96	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD TPA Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	204.474,459
123	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Baik	33,75	TBRS Jalan Sriwijaya no 29 Kecamatan Candisari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	108.412,686
124	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	28	UPTD TPA Jatibarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	197.234,686
125	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	36	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Hibah	90.829,907
126	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	504	Jl.Tapak Tugurejo Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	194.846,724
127	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	10.000	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Hibah	14.023.712,312
128	Pagar Permanen	Baik	298	Jalan Tapak Tugurejo Kecamatan Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	342.799,337
129	Pagar Permanen	Baik	317,402	Kantor UPT TPA Jatibarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	205.697,555
130	Pagar Permanen	Baik	244,84	Jl. Tirto Agung Barat V Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	304.323,75
131	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	125	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (UPTD Jatibarang)		Tanah Milik Pemda	HIbah	1.455.666,118
132	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	48	Pasar Perumahan Jatisari Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen			Pembelian	88.677,285
133	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jl. Jangli Gabeng Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang			Pembelian	86.240,476

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
134	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	100,8	Jl. Mundu Baru II Perum Wanamukti Kel. Sambiroto Kec. Tembalang			Pembelian	56.423,307
135	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	60	Jl. Taman Tlogomulyo Cluster 2 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Semarang			Pembelian	88.687,331
136	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	56,27	Jl. Burangrang Raya Kelurahan Jangli RW I , Kecamatan Tembalang			Pembelian	87.863,527
137	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	37,5	Kios Pasar Banjardowo Jl. Genuksari Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang			Pembelian	84.170,919
138	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	35	Jl. Klipang Raya Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang			Pembelian	152.450,175
139	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang			Pembelian	80.659,146
140	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jalan Lodan Raya Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara		Tanah Milik Pemda	Pembelian	81.365,743
141	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	60	Jalan Teratai Timur Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang Semarang			Pembelian	144.071,706
142	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jl. Ondorante Bangunharjo Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik			Pembelian	280.805,137
143	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	257,1	UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah 3 DLH Kota Semarang Jl. Tirtoagung Banyumanik			Pembelian	307.469,249
144	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Baik	153	Kelurahan Bendan duwur Kecamatan Gajah Mungkur (Hutan Kota Gunung Talang)			Pembelian	234.778,498
145	Pagar Permanen	Baik	3.240,43	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen			Pembelian	199.798,897

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
146	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	57,5	Jl. Durian No.30, Lamper Kidul Semarang Selatan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	412.655,679
147	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	35	JL. Mulawarman Barat II, Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Kota Semarang			Pembelian	115.376,645
148	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	105	Kel. Gemah Kec. Pedurungan Semarang			Pembelian	563.061,625
149	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	JL.Lingkar Tanjung Mas Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang			Pembelian	93.337,342
150	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	18	Jl.Jangli Raya Kel. Karangb Anyar Gunung, Kec. Candisari Kota Semarang			Pembelian	63.322,05
151	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	55	Jl. Peterongan Tengah Raya Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang			Pembelian	154.762,923
152	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	35	Jl. Jogo Prono Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati			Pembelian	126.727,174
153	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	56	Jl. Sembungharjo Raya Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk Kota Semarang			Pembelian	133.740,164
154	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	42	Jl. Tanggul Kel Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang			Pembelian	92.541,636
155	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	Baik	38,5	Jl. Tapak Tugurejo Tugu Semarang			Pembelian	217.155
156	Taman Permanen	Baik	4.000	Jalan Tapak Tugurejo Tugu Semarang			Pembelian	1.401.807,219
157	Pagar Permanen	Baik	90,2	Jl. Untung Suropati Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang			Pembelian	187.540,5
158	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	260	Jl. Muktiharjo Raya Kelurahan Kaligawe Kec Gayamsari Kota Semarang			Pembelian	1.181.328,84
159	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	300	Jl. Barito Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur			Pembelian	322.744,95

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
160	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	30,75	Jl. Barito Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur			Pembelian	89.023,8
161	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	35	Jl. Taman Teuku Umar Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	105.916,5
162	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jl. Taman Teuku Umar Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik			Pembelian	135.287,2
163	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	106,8	JL. Wonodri Baru Raya, Kel, Wonodri Kec, Semarang Selatan			Pembelian	193.593,25
164	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40,5	Jl. Kasipah Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang			Pembelian	128.611,1
165	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jl. Hanoman Raya Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat			Pembelian	139.247,4
166	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	50	Jl. Erlangga Barat 7, Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	132.973,2
167	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	50	JL. Satria Raya Kel. Plombokan Kec. Semarang Kota Semarang			Pembelian	149.009
168	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jl. Pusponjolo Barat Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang			Pembelian	82.858,992
169	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	45	Jl. Pengapon Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang			Pembelian	153.408
170	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	96	Jl. Barusari Baru Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan			Pembelian	184.261,95
171	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jl. Puspowarno Tengah Kel. Salamanmulyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang			Pembelian	59.721
172	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	30	UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wil. II , Jl. Muktiharjo, Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	194.395

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
173	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	463,75	DLH Kota Semarang. Jl. Tapak Tugurejo Kec. Tugu Semarang			Pembelian	164.350
174	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	224	Jl. Tapak Kel.Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.626.182
175	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	53,2	Jl. Tumpang Raya Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang			Pembelian	221.377,2
176	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	49,98	Jl. Pandansari 4 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari			Pembelian	107.727
177	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	53,23	Jl. Kanal Pandean Lamper (Tanggul Indah) Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan			Pembelian	119.208,7
178	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	32,25	Jl. Jangli Gabeng Kel. Jangli Kec. Tembalang Semarang			Pembelian	190.995,4
179	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jl. Perum Dolog Lor, Kel Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan			Pembelian	132.082
180	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	50,88	Jl. Lamongan Raya Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur			Pembelian	181.252,2
181	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	81,1	Jl. Anggraini Raya, Kel. Bulu Lor, Kec Semarang Utara Kota Semarang			Pembelian	70.768,7
182	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	30	Jl. Gunung Tengah Jati Timur Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang			Pembelian	85.255,5
183	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	80,8	Jl. Jolotundo I Kel. Siwalan Kec. Gayamsari Kota Semarang			Pembelian	85.244
184	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	45,5	Jl. Karangsaru Kelurahan Brumbungan Kecamatan Semarang Tengah			Pembelian	296.719,646
185	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	78	Jl. Stadion Selatan No.11 Karang Kidul Kec. Semarang Tengah			Pembelian	190.807,5
186	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	64,25	Jl. Cempedak Utara, Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang			Pembelian	92.974,5

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
187	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	159,5	Jl. Taman Tlogomulyo Cluster 2, Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan			Pembelian	69.282
188	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	46,2	Jl. Trangkil Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik			Pembelian	72.220,3
189	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	30	Jl. Pelem Golek Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan			Pembelian	176.059,3
190	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	35,12	Jl. Jangli Tlawah, Kel. Karanganyar gunung Kec. Candisari			Pembelian	105.556,1
191	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	312	Jl. Stasiun Jerakah Kel. Tambakharjo Kec. Semarang Barat			Pembelian	148.447,7
192	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	55	Jl. Kolonel Sugiono , Kel. Dadapsari Kec. Semarang Utara		Tanah Milik Pemda	Pembelian	148.270
193	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	66	Jl. Patriot Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara			Pembelian	193.096
194	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	63	Jl. Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara			Pembelian	83.432
195	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	46,2	Jl. Jatibarang Kelurahan Jatibarang Kel. Jatibarang Kec. Mijen			Pembelian	113.148
196	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	44,66	Pasar Banjardowo Kel. Banjardowo Kec. Genuk Kota Semarang			Pembelian	110.896,7
197	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	30,6	JL. Rinjani Kel. Bendungan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang			Pembelian	85.561
198	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	42	Jl. Inspeksi Kel. Kembangsari Kec. Semarang Tengah			Pembelian	107.970,4
199	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	60	Jl. KIK Terboyo Kel. Terboyo wetan Kec. Genuk Kota Semarang			Pembelian	159.682

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
200	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	41,1	JL. Mlatibaru Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang			Pembelian	76.463
201	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jl. Sendangguwo Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang			Pembelian	85.012
202	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	98	JL Karangrejo Tengah Kel. Karanrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang			Pembelian	153.053
203	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	40	Jl. Sawah Besar XV Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari			Pembelian	121.060
204	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	72	Jl. Wonosari Gang 8 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan			Pembelian	86.037
205	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	34,02	Jl. Kyai Saleh Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang			Pembelian	109.369
206	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	62	Jl. Perum Rumpun Diponegoro Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik			Pembelian	98.763,7
207	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	42,25	UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wil 2 , Jl. Muktiharjo Raya Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota			Pembelian	168.644
208	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	2.576	Jl. Tapak Tugurejo , Kel. Tugurejo Kec. Tugu Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.116.695,237
209	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	112	UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wil. II , Jl. Muktiharjo, Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	196.968
210	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	47,775	Jl. Klipang, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	199.023,36
211	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	117,165	Jl. Sriwidodo Utara VII/474, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang			Pembelian	215.984,653
212	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	115,29	Jl. Singosari Timur Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan			Pembelian	256.419,093

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
213	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	22	Jl. Gatot Subroto Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan			Pembelian	1.284.690
214	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Baik	10	Jl. Untung Suropati Kel. Kedungpane Kec. Mijen			Pembelian	92.545
215	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	24	Kelurahan Sukorejo (Ageratum Biru) Kecamatan Gunung Pati (Sebelah KAMPUNG JAWI)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	182.941,75
216	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	24	Kelurahan Jatirejo Kecamatan Mijen Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	183.018,5
217	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	24	Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	183.102,6
218	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	24	Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	182.996
219	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	24	Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	183.148,5
220	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	70	Pasar Klitikan			Pembelian	214.599,6
221	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	31	Jalan Kedung Mundu, Sambiroto, Tembalang, Sambiroto, Semarang, Kota Semarang			Pembelian	201.614,05
222	Pagar Semi Permanen	Baik	1.232	Jl. Untung Suropati Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen			Pembelian	67.155
223	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	50	Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang			Pembelian	50.350
224	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	140	Perum Gedawang Pesona Asri No. C3, Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik			Pembelian	198.162,25
225	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	120	TPS 1 Pawiyatan (jalan pawiyatan luhur, kelurahan bendan duwur, kecamatan Gajahmungkur)			Pembelian	199.238,488
226	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	30	Jalan gergaji Balekambang kelurahan mugassari kecamatan Semarang Selatan			Pembelian	50.700
227	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	30	Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang			Pembelian	50.800

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
228	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	48	Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang			Pembelian	50.400
229	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	175	Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang			Pembelian	234.225
230	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	75,75	Jl. Cilosari Dalam, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	199.214
231	Pagar Permanen	Baik	33,68	Jl. Tapak Tugurejo Kec. Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	150.469
232	Pagar Permanen	Baik	71,48	Jl. Durian Barat Kel. Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	83.664,5
233	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	183,4	Jl. Tapak Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang			Pembelian	102.798
234	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	100,62	Jl. Wr. Supratman, Ngemplak, Simongan, Kecamatan Semarang Barat			Pembelian	199.273,621
235	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	50	Jl Untung Suropati Kedungpane Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	99.771,916
236	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Baik	420	Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	199.378,888
237	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	200	TPS3R Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang			Pembelian	165.787,731
238	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	70	Jl Tapak Tugurejo Kecamatan Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	140.862
239	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	5	Jl. Tapak Kel. Tugurejo Kec. Tugu Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	7.140,37
240	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	12	Jl. Plamongan Larasati Raya Kel. Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	11.457,7
241	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	12,31	Jl. Taman Tlogomulyo Cluster Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan			Pembelian	39.930
242	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	46,2	Jl. Slamet Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Semarang			Pembelian	31.494
243	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	45,54	Jl. Murbei Kel. Sumuroto Kec. Banyumanik			Pembelian	35.624,5
244	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	60	TPS Gisiksari dan TPS Purwoyoso			Pembelian	49.800

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
245	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	50	Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik			Pembelian	24.636,45

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan lingkungan hidup yang disajikan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai			NA	78,37	78,57	75,75	75,85	NA	80,58	73,71	75,75	76,75	NA	102,78	93,81	100	101,19
2	Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu	persen			NA	NA	50,00	50,20	78,92	NA	NA	44,55	78,82	80,56	NA	(sangat baik)	(baik)	(baik)	(sangat baik)
3	Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu	persen			NA	NA	50,00	50,20	87,50	NA	NA	87,50	93,75	100	NA	NA	89,10	157,01	102,08
4	Persentase penurunan emisi GRK	persen			NA	NA	2,00	2,00	20,00	NA	NA	5,90	4,69	5,98	NA	NA	(baik)	(sangat baik)	(sangat baik)
5	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	persen			NA	85,20	85,40	85,60	88,33	NA	85,20	86,08	88,23	88,62	NA	NA	175	186,75	114,29
6	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%			NA	74,00	73,00	72,00	71,00	NA	74,22	73,31	72,10	71,34	NA	100	(sangat baik)	(sangat baik)	(sangat baik)

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
		13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
3	Satuan kinerja	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

a. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun data sebagaimana berikut :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2020-2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI ANGGARAN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	38.509.858.705	41.190.659.743	47.341.775.943	47.628.753.694	-	36.395.677.042	40.150.306.346	45.454.661.613	46.455.871.670	-	94.51	97,5	96	97,5	7,50	8,58
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	358.747.285	312.428.046	621.333.732	524.670.792	-	277.983.691	306.318.036	588.047.439	507.094.070	-	77,5	98	94,6	96,7	23,47	29,47
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	5.674.301.954	7.108.501.152	7.822.918.808	4.997.461.095	-	4.870.669.798	6.315.565.048	7.051.431.325	4.526.008.174	-	85,8	88,9	90,1	90,6	(0,26)	1,83
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	790.940.082	842.034.838	854.294.162	1.136.804.149	-	683.272.928	756.438.713	838.280.989	1.043.833.604	-	86,4	89,8	98,1	91,8	13,66	15,35
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	1.768.672.769	248.466.649	380.196.509	357.477.977	-	1.397.202.652	229.937.493	327.636.348	323.181.932	-	79	92,5	86,2	90,4	(12,97)	(14,14)
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	-	561.076.175	903.660.473	706.029.187	661.561.250	-	465.320.287	797.801.999	651.158.104	587.783.950	-	82,9	88,3	92,2	88,9	10,96	14,45
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan	-	856.010.769	2.505.961.817	3.450.666.920	1.782.483.952	-	758.925.784	2.398.944.844	3.137.959.895	1.487.868.157	-	88,7	95,7	90,9	83,5	60,70	64,77

URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI ANGGARAN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat																	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	496.220.949	247.075.135	598.991.175	279.629.974	-	464.740.808	224.936.817	566.195.337	273.403.368	-	93,7	91	94,5	97,8	12,97	16,13
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	107.658.746	130.458.560	128.807.617	119.599.546	-	90.053.906	113.873.842	125.605.117	116.867.698	-	83,7	87,3	97,5	97,7	4,25	9,93
Program Pengelolaan Persampahan	-	85.037.552.900	97.016.593.824	93.830.125.080	69.115.052.158	-	83.797.442.247	92.992.765.324	90.659.909.724	65.872.598.478	-	98,5	95,9	96,6	95,3	-5,18	- 6,29
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	67.865.244.500	-	-	-	-	67.205.597.686	-	-	-	-	99.03	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.627.942.000	-	-	-	-	5.677.424.678	-	-	-	-	85.66	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.128.803.000	-	-	-	-	14.938.567.478	-	-	-	-	98.74	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	444.980.000	-	-	-	-	415.117.550	-	-	-	-	93.29	-	-	-	-	-	-
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.242.235.500	-	-	-	-	4.115.577.676	-	-	-	-	97.01	-	-	-	-	-	-

URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI ANGGARAN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	825.237.000	-	-	-	-	796.613.750	-	-	-	-	96.53	-	-	-	-	-	-
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	70.170.000	-	-	-	-	66.665.100	-	-	-	-	95.01	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	702.265.000	-	-	-	-	678.643.350	-	-	-	-	96.64	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	629.973.000	-	-	-	-	624.200.700	-	-	-	-	99.08	-	-	-	-	-	-
Program Penguatan Kapasitas Mitigasi Perubahan Iklim	994.897.000	-	-	-	-	978.694.599	-	-	-	-	98.37	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

1	Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
3	Anggaran tahun kedua renstra disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
4	Anggaran tahun ketiga renstra disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
5	Anggaran tahun keempat renstra disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
6	Anggaran tahun elima renstra disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keternagan 2-6
7	Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keternagan 7 -11
8	Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun		
9	Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun		
11	Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

b. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

1. Pengawasan Pelaksanaan AMDAL

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perizinan merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang mana pencegahan tersebut merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja program peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkingan hidup adalah pelayanan dokumen lingkungan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan selama kegiatan berlangsung. Pelayanan dokumen lingkungan yaitu pelayanan Izin Lingkungan yang terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDALl) dan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta pelayanan Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Layanan AMDAL/UKL/UPL dan SPPL diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi pelaku/ kegiatan usaha yang akan dibangun. Selama kurun waktu 2020-2024, rekomendasi dokumen lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan uraian sebagai berikut :

Gambar 2.3 Dokumen Izin Lingkungan

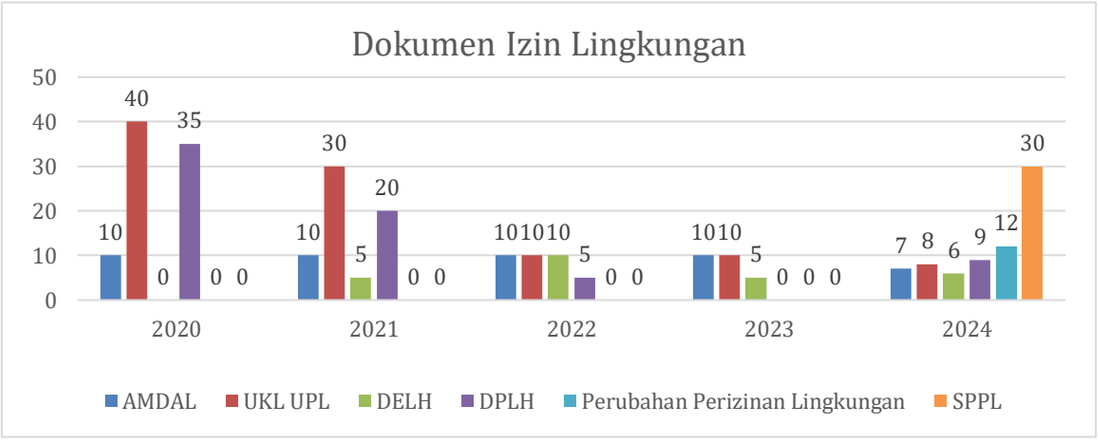

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Gambar 2.4 Sidang Perizinan Lingkungan

Sumber: DLH Kota Semarang, 2024

Jumlah pengawasan yang di lakukan oleh DLH Kota Semarang, mengalami hal sama penurunan yang signifikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang diakibatkan kewenangan penilaian dan pengawasan.

Gambar 2.5 Pengawasan Perijinan Lingkungan

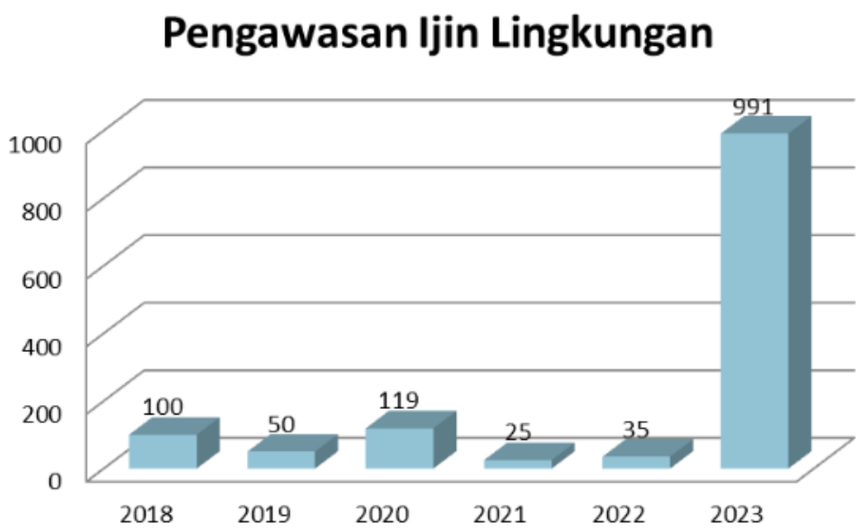

Sumber: DLH Kota Semarang,2023

Gambar 2.6 Kegiatan Pengawasan Lingkungan

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

2. Layanan Perijinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemicu lain dari sumber limbah padat dari sumber pencemar bergerak dan tidak bergerak di Kota Semarang, tidak mengalami perubahan untuk sumber pencemara bergerak. Sedangkan sumber pencemaran tidak bergerak ada perubahan yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2022.

Gambar 2.7 Limbah Padat dari Sumber Pencemar

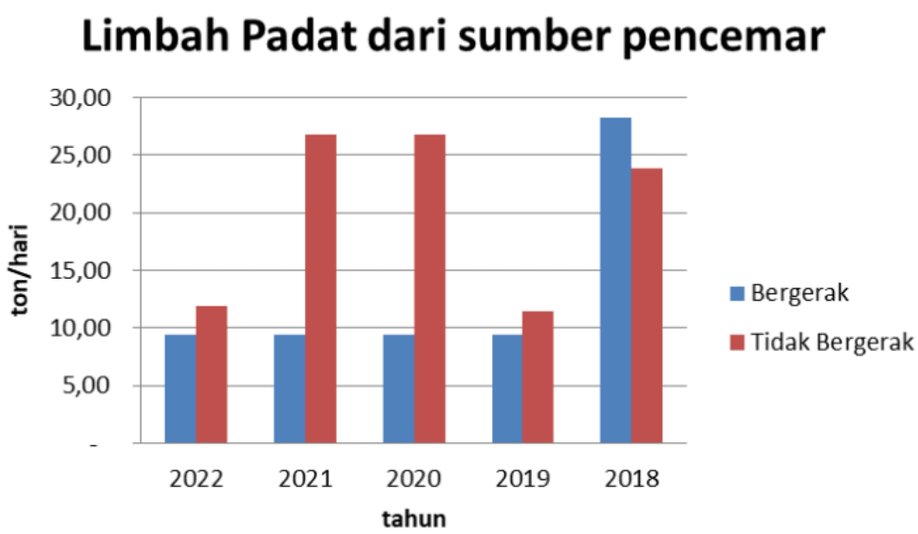

Sumber: DLH Kota Semarang, 2022

Gambar 2.8 Izin Limbah B3

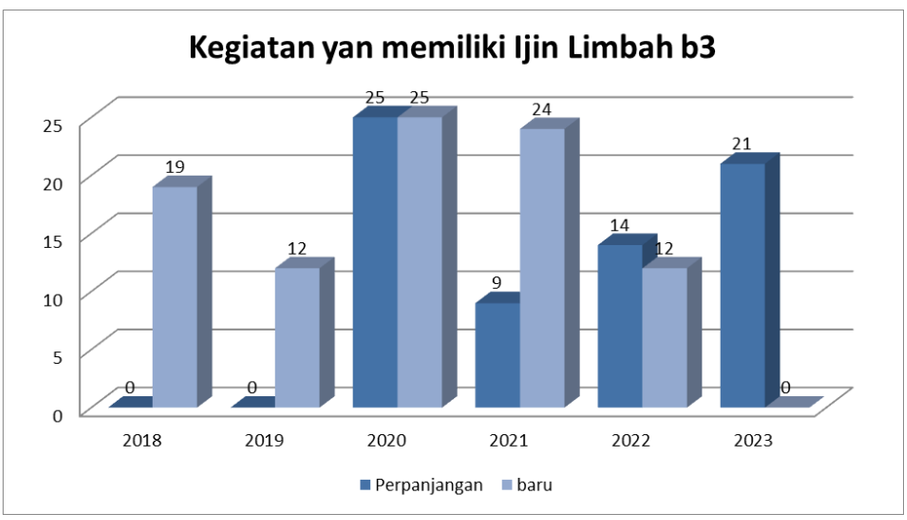

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Gambar 2.9 Kegiatan Pertek Limbah Cair dan Udara

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

3. Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan terdiri dari jumlah mediasi sengketalingkungan dan jumlah kasus yang berlanjut ke penegakan hukum. Tahun 2023 sudahterdapat 51 kasus yang merupakan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Adapun data pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

No.	Pengaduan Kasus / Sengketa Lingkungan	Kasus yang ditindaklanjuti						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah mediasi sengketa lingkungan	54	31	14	4	5	6	13
2.	Jumlah kasus lingkungan yang masuk	62	54	51	53	53	53	51

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Gambar 2.10 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

4. Pelayanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan

Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dilaksanakan oleh oleh Laboratorium

Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan salah satu bagian dari DLH Kota Semarang. Laboratorium lingkungan hidup Daerah sebagai unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan pengujian sampel hingga kurun waktu tahun 2016-2021 UPT Laboratorium telah menerima sampel/contoh uji sebanyak 9917 sampel, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.9 Pelayanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan

No.	Pelayanan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Jumlah sampel yang dilakukan pengujian	2.247	2.524	2.275

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga melakukan pemantauan kualitas air sungai untuk menentukan kadar pencemaran dan sungai yang berpotensi dicemari. Setiap tahunnya melakukan pemantauan kualitas air sungai di 16 kecamatan yang mewakili kondisi Kota Semarang yang dilakukan dalam 2 periode yaitu pada musim penghujan maupun musim kemarau. Tidak hanya itu saja, untuk menekan pencemaran udara yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Kota Semarang salah satunya emisi kendaraan, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi polusi udara antara lain dengan melakukan uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan secara rutin detiap tahun. Adapun dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10 Hasil Pengujian Emisi Kendaraan Tahun 2021-2023

Tahun	Bensin (unit)		Solar (unit)		Total (unit)		Jumlah kendaraan yang diuji (unit)
	Lolos Uji	Tidak Lolos Uji	Lolos Uji	Tidak Lolos Uji	Lolos Uji	Tidak Lolos Uji	
2021	1584	106	243	174	1827	280	2107
2022	1634	162	207	238	1841	400	2241
2023	1571	158	134	282	1705	440	2145

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Gambar 2.11 Kegiatan Sampling Air

Sumber: DLH Kota Semarang,2023

Gambar 2.12 Kegiatan Sampling Emisi Kendaraan

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Saat ini permasalahan lingkungan hidup diperkotaan sangat kompleks, hal ini salah satunya disebabkan karena semakin pesatnya dunia usaha/ kegiatan usaha di Kota Semarang yang akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kualitas lingkungan hidup disekitarnya.

Dinas Lingkungan Hidup dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dengan menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana dokumen tersebut menggambarkan kondisi lingkungan Kota Semarang yang mencakup beberapa aspek kualitas lingkungan.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks kualitas lingkungan hidup yaitu untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan tingkat daerah tentang kondisi lingkungan sebagai

bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program- program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	44,84	50,93	51,94	62,88	66,05	59,6	51,32	56,84

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks pencemaran air digunakan untuk menilai kualitas suatu badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Pengambilan sampel kualitas air berupa uji laboratorium dengan parameter pH, TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform.

Tabel 2.12 Indeks Kualitas Air (IKA)

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	45,25	39	31,01	48,75	50,44	50	33,76	46

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara merupakan angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah, yang diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Pemantauan kualitas udara ambien pada umumnya mencakup beberapa parameter pencemar udara seperti : SO2, NO2, O3, PM2,5, PM 10 ,dll sehingga untuk mempermudah pemahaman masyarakat terhadap arti kualitas udara ambien maka diformulasikan dalam bentuk indeks kualitas udara (IKU).

Tabel 2.13 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara (IKU)	61,72	47,8	74,27	85,5	95,2	75	77,38	80,55

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung dengan menjumlahkan jumlah luas tutupan hutan yang ada di Kota Semarang dengan total luas wilayah Kota Semarang. Tutupan hutan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, semak/belukar, semak/belukar rawa, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang terbuka hijau. Luas wilayah yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas tutupan lahan adalah luas wilayah daratan pada Kota Semarang, sedangkan luasan tutupan hutan yang digunakan adalah total luasan hasil perhitungan sesuai Peraturan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan No. P.1 Th 2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Tabel 2.14 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	31,88	50,9	56,51	56,51	55,9	47,58	33,28	31,63

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

5. Emisi GRK dan Penurunannya

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah fenomena alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer Bumi menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan Bumi, lalu memancarkannya kembali ke semua arah. Emisi GRK yang dipunyai Kota Semarang itemnya terdiri dari energi, IPPU, pertanian, kehutanan dan limbah. Dampak dari emisi GRK ini yatu terjadi pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, perubahan iklim. Maka dari itu perlu dilakukan penurunan terhadap emisi GRK tersebut. Kota Semarang mempunyai data terkait emisi yang dihasilkan beserta penurunannya.

Tabel 2.15 Emisi GRK dan Penurunannya

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Emisi GRK (TonCO2eq)	5591910	4211030	5137720	5302150	6371420
Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	12949,88	41371,30	90,93	31816,98	309,27

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Salah satu upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang diantaranya dengan memberlakukan hari bebas kendaraan (Car Free Day) di dua lokasi, yaitu di Jalan Pemuda dan Jalan Pahlawan. Tujuan pelaksanaan Car Free Day yaitu mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak sehingga adanya peningkatan kualitas udara dan layak untuk dihirup.

Gambar 2.13 Kegiatan Car Free Day

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Selain itu kontribusi penurunan emisi GRK yang dilakukan di Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar.

Gambar 2.14 Penurunan Potensi Emisi Kota Semarang

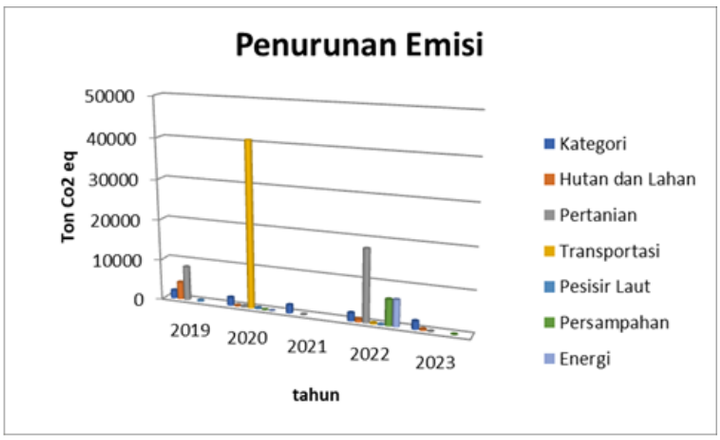

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kota Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2022 mengalami tren turun sebesar 0,41% atau 21,99 Gg CO2eq. Tren penurunan tersebut dipengaruhi oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi dengan penurunan sebesar 5,84% atau setara dengan 226,35 Gg CO2eq. Selain itu penurunan tersebut juga disebabkan oleh sektor AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use), terjadi penurunan pada kegiatan pertanian dan pemakaian pupuk sebesar 39,96% atau setara dengan 26,66 Gg CO2eq. Sedangkan untuk sektor IPPU dan Pengelolaan Limbah terjadi tren kenaikan sebesar 7,15% atau setara dengan 11,82 Gg CO2eq untuk sektor IPPU dan 165,88 Gg CO2eq (12,45%) untuk sektor pengelolaan limbah.

6. Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dan perubahan iklim

Adaptasi perubahan iklim merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Upaya adaptasi dan mitigasi merupakan paket utuh pengendalian perubahan iklim yang harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Upaya adaptasi dan mitigasi menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bencana dan kerugian yang lebih parah akibat terjadinya perubahan iklim.

Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai sebuah gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas merupakan respon terhadap dampak perubahan iklim. ProKlim memuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK. Penghargaan Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional

a. Penghargaan Program Kampung Iklim dengan kategori Trophy Proklim Utama diberikan kepada RW 15, Kelurahan TanjungMas, Kecamatan Semarang Utara; dan
b. Program Kampung Iklim dengan kategori Trophy Proklim Lestari diberikan kepada RW 03, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik.

Tabel 2.16 Jumlah Program Kampung Iklim (Proklim)

Tahun	Kategori				
	Kota	Pratama	Madya	Utama	Lestari
2021	4	-	-	3	-
2022	33	-	-	14	-
2023	20	20	-	-	1

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Gambar 2.15 Sosialisasi Program Kampung Iklim

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

7. Pembinaan Sekolah Adiwiyata

Sekolah adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Pembinaan sekolah adiwiyata dilakukan setiap tahunnya oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada sekolah baik SD/MI, SMP maupun SMA se-kota semarang dengan melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi dan penilaian sekolah adiwiyata. Program Adiwiyata melakukan penilaian sebanyak satu kali dalam setahun, penilaian ini bertahap, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Program Adiwiyata dilakukan berdasarkan pada 3 prinsip yaitu: edukatif (memberikan informasi bermanfaat bagi seluruh warga sekolah), partisipatif (warga sekolah ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) dan berkelanjutan (kegiatan dilakukan dengan perencanaan baik dan dapat dilakukan secara terus menerus). Adapun manfaat yang dirasakan diantaranya dapat menggalakkan pelestarian lingkungan yang begitu penting dilingkungan sekolah, membentuk kebiasaan baik bagi seluruh warga sekolah yang bisa diterapkan saat tidak di dalam lingkungan sekolah. Dalam menjalankan dan melaksanakan Program Sekolah Adiwiyata, setiap sekolah paling tidak memenuhi setidaknya ada 4 hal pokok yang diwajibkan. Untuk itu yang harus diperhatikan pihak sekolah, yaitu:

1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan;
2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan;
3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif; dan
4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Pelayanan pembinaan sekolah Adiwiyata terdiri dari jumlah sekolah yang dibina di Kota Semarang dengan jumlah sekolah yang mendapat penghargaan tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri.

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2023

a. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
   - SMA Karangturi Semarang
   - SMA N 16 Semarang

b. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi
   - SMA N 8 Semarang
   - SD N Bulu Lor Semarang
   - SD Petra Semarang
   - SD N Pleburan 03 Semarang

Tabel 2.17 Daftar Sekolah Adiwiyata

No.	Nama Sekolah	Jenis Penghargaan Adiwiyata	Tahun Perolehan
1	SDN Karanganyar Gunung 02	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
2	SDN Pekunden	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
3	SDN Mlatiharjo 02	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
4	SDN Sambiroto 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
5	SD Marsudirini	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
6	SDN Kramas	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
7	SDN Purwoyoso 04	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
8	SDN Karangayu 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
9	SD Semesta	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
10	SDN Srondol Wetan 04	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
11	SDN Mangunharjo Tugu	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
12	SDN Banyumanik 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
13	SMPN 9 Semarang	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
14	SMPN 19 Semarang	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
15	SMPN 14 Semarang	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
16	SMPN 3 Semarang	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
17	SMPN 1 Semarang	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
18	SMPN 15 Semarang	Sekolah Adiwiyata Kota	2023
19	SDN Pendrikan Lor 03	Sekolah Adiwiyata Kota	2022
20	SDN Wonotingal	Sekolah Adiwiyata Kota	2022
21	SDN Pedurungan Tengah 02	Sekolah Adiwiyata Kota	2022
22	SDN Sambiroto 02	Sekolah Adiwiyata Kota	2022
23	SDN Pendrikan Lor 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2022
24	SDN Rejosari 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2022
25	SMPN 18	Sekolah Adiwiyata Kota	2022
26	SMPN 27	Sekolah Adiwiyata Kota	2022
27	SMPN 6	Sekolah Adiwiyata Kota	2022
28	SDN Sambiroto 03	Sekolah Adiwiyata Kota	2021
29	SDN Candi 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2021
30	SDN Pleburan 03	Sekolah Adiwiyata Kota	2021
31	MI Darul Ulum	Sekolah Adiwiyata Kota	2021
32	SMPN 24	Sekolah Adiwiyata Kota	2021
33	SMPN 25	Sekolah Adiwiyata Kota	2021
34	SDN Padangsari 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2019
35	SDN Ngaliyan 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2019
36	SDN Barusari 02	Sekolah Adiwiyata Kota	2019
37	SDN Bugangan 03	Sekolah Adiwiyata Kota	2019

No.	Nama Sekolah	Jenis Penghargaan Adiwiyata	Tahun Perolehan
38	SD Alam Ar Ridho	Sekolah Adiwiyata Kota	2019
39	SMPN 10 Semarang	Sekolah Adiwiyata Kota	2019
40	SD N Wonolopo 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2018
41	SD N Kalisegoro	Sekolah Adiwiyata Kota	2018
42	SD N Tambak Aji 04	Sekolah Adiwiyata Kota	2018
43	SMPN 28	Sekolah Adiwiyata Kota	2018
44	SD N Srondol Kulon 02	Sekolah Adiwiyata Kota	2017
45	SD N Gunungpati 03	Sekolah Adiwiyata Kota	2017
46	SD N Gedawang 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2017
47	SD N Karangroto 02	Sekolah Adiwiyata Kota	2017
48	SD N Tambakaji 05	Sekolah Adiwiyata Kota	2017
49	SMP Islam Al Azhar 29	Sekolah Adiwiyata Kota	2017
50	SD Bunda Hati Kudus	Sekolah Adiwiyata Kota	2016
51	SMKN Jawa Tengah	Sekolah Adiwiyata Kota	2016
52	SMK Penerbangan	Sekolah Adiwiyata Kota	2016
53	SMPN 41	Sekolah Adiwiyata Kota	2016
54	SD Patemon 02	Sekolah Adiwiyata Kota	2015
55	SD Muktiharjo Lor	Sekolah Adiwiyata Kota	2015
56	SDN Pakintelan 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2014
57	SD N Muktiharjo Kidul 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2013
58	SD N Sadeng 02	Sekolah Adiwiyata Kota	2012
59	SD Kemala Bayangkari 04	Sekolah Adiwiyata Kota	2012
60	SD N Kandri 01	Sekolah Adiwiyata Kota	2011
61	SMP Maria Goreti	Sekolah Adiwiyata Kota	2012
62	SMP N 20	Sekolah Adiwiyata Kota	2013
63	SMAN 2	Sekolah Adiwiyata Kota	2013
64	SMA St Louis	Sekolah Adiwiyata Kota	2013
65	SMK N 7	Sekolah Adiwiyata Kota	2015
66	SMPN 42	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
67	SDN Sendangmulyo 01	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
68	SDN Rejosari 02	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
69	SMPN 32	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
70	SMPN 40	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
71	SMPN 37	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
72	SMPN 30 Semarang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
73	SD N Bojongsalaman 01	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
74	SMPIT PAPB	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
75	SMPN 34 Semarang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
76	SD N Purwoyoso 03	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
77	SMPN 23	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
78	SMPN 22	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
79	SMPN 43	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
80	SDN Bangetayu Wetan 02	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
81	SDN Sembungharjo 01	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
82	SMPN 11	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
83	SMPN 5	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024

No.	Nama Sekolah	Jenis Penghargaan Adiwiyata	Tahun Perolehan
84	SMP N 26	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
85	SMPN 12	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
86	SD Islam Hidayatullah	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2024
87	SMA N 8	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2023
88	SD N Bulu Lor	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2023
89	SD Petra	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2023
90	SD N Pleburan 3	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2023
91	SMPN 2	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2022
92	SD N Pleburan 04	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2022
93	SD N Tinjomoyo 01	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2021
94	SMPN 21	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2020
95	SMA N 09	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2019
96	SDN TUGUREJO 01	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2018
97	SDN Jatirejo	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2017
98	SDN SRONDOL WETAN 05	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2017
99	SMA N 13	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2016
100	SMA PL DON BOSCO	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2016
101	SD PUDAKPAYUNG 02	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2016
102	SD TLOGOSARI KULON 03	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2016
103	SMA N 6	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2015
104	SMAN 1	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2015
105	SMKN 6	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2015
106	SMPN 16	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2014
107	SMAN 3	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2014
108	SMAN 12	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2014
109	SD Islam Al Azhar 14	Sekolah Adiwiyata Nasional	2024
110	SMPN 39 Semarang	Sekolah Adiwiyata Nasional	2024
111	SMAN 11 Semarang	Sekolah Adiwiyata Nasional	2024
112	SMKN 2 Semarang	Sekolah Adiwiyata Nasional	2024
113	SMPN 13	Sekolah Adiwiyata Nasional	2023
114	SMAN 16	Sekolah Adiwiyata Nasional	2023
115	SMA Karangturi	Sekolah Adiwiyata Nasional	2023
116	SD N Tembalang	Sekolah Adiwiyata Nasional	2022
117	SDN Sendang Mulyo 04	Sekolah Adiwiyata Nasional	2015
118	SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang	Sekolah Adiwiyata Nasional	2014
119	SD Katolik Sang Timur	Sekolah Adiwiyata Nasional	2014
120	SDN Padangsari 02	Sekolah Adiwiyata Nasional	2014
121	SDN Sarirejo	Sekolah Adiwiyata Nasional	2014
122	SDN Srondol Wetan 02	Sekolah Adiwiyata Nasional	2014
123	SMPN 33 Semarang	Sekolah Adiwiyata Nasional	2014
124	SD Santo Antonius 02 Banyumanik	Sekolah Adiwiyata Nasional	2013
125	SDN Lamper Kidul 02	Sekolah Adiwiyata Nasional	2013
126	SMAN 7 Semarang	Sekolah Adiwiyata Nasional	2013
127	SMAN 14 Semarang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	2024
128	SMA N 04	Sekolah Adiwiyata Mandiri	2024

No.	Nama Sekolah	Jenis Penghargaan Adiwiyata	Tahun Perolehan
129	SMPN 31 Semarang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Gambar 2.16 Kegiatan Adiwiyata

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

8. Pembinaan dan Pemberdayaan Bank Sampah

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang No.4510/660.1/B. IV/XI/2022 tentang penetapan Bank Sampah Se-Kota Semarang. Pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah. Dimana dalam proses pengolahan sampahnya melibatkan peran serta masyarakat guna mengolah sampah secara mandiri dari sumbernya dan dengan menggunakan metode 3R. Sampah organik nantinya akan dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik dapat dijual di bank sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat karena menjadikan lingkungan menjadi bersih dan sehat dan juga dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar karena adanya penjualan sampah melalui bank sampah. Pada tahun 2019, terdapat 220 Bank Sampah yang aktif, tahun 2020 sebanyak 109 bank sampah yang aktif. Pada tahun 2021 sebanyak 119 unit terdiri 116 Bank Sampah Unit, dan 3 unit bank sampah induk. Pad atahun 2022 bank sampah di Kota Semarang sebanyak 497 unit bank sampah.

Gambar 2.17 Bank Sampah di Kota Semarang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Tabel 2.18 Daftar Bank Sampah di Kota Semarang

No	Lokasi	Nama Bank Sampah
1	Parikesit VII Rt 10 Rw 2, Banyumanik	Bs Pendawa Berjaya
2	Banyumanik Rw 8 Banyumanik	Bs Samber Rejeki
3	Jl H Suradi No 3 Gedawang Banyumanik	Bs Gedawang Asri
4	Rw 1 Kel.Gedawang	Bs Melati
5	Rw 2 Kel.Gedawang	Bs Kenanga Asri
6	Rw 3 Kel.Gedawang	Bs Mawar
7	Rw 4 Kel.Gedawang	Bs Flamboyan
8	Ol, Tejosari 10.05 Rw.05 Kel. Gedawang	Bs Sempulur Asri
9	Rw 6 Kel.Gedawang	Bs Berkah Mandiri
10	Rw 7 Kel.Gedawang	Bs Anggrek
11	Rw 8 Kel.Gedawang	Bs Sakura
12	Rw9 Kel.Gedawan	Bs Pojok Gawang
13	Rw 10 Kel.Gedawang	Bs Terati Putih
14	Jabungan Rw 6, Banyumanik	Bs Kartini
15	Ulin Selatan Vūno 1 17 Iew 12	Bs Omah Resik
16	Padangsarirw 2, Banyumanik	Bs Arta Lestari
17	Meranti Banyumanik	Bs Mekar Meranti
18	Pedalangan Rw 5 Banyumanik	Bs Cempaka
19	Pundakpayung Rw 4	Ds Payung Lestari
20	Jl Payung Prasetya Iv Perum Korpri	Bs Prasetya Berseri
21	Bumi Rejo Rt 4 Rw 6	Bs Bumi Rejo
22	Jl Prafauka Dawijnci 4 Rt 4 Riw 2 Pudakpayung	Bs Family Mandiri
23	Jl Payung Asri Selatan I Rt 7 Rw 1 Pudakpayung	Bs Uwuh Kencana
24	Ji Muteran 1 Rtoi Rw 03 Pudakpayung	Bs Bina Asri
25	Balai Rt 08 Rw 10 Pudakpayung	Bs Pesona Asri Mandiri
26	Ngesrep Barat Iiv Rt 2 Rw 8	Bs Bina Artha Mulia
27	Srondol Kulon Rt 2 Rw 5, Srondol	Bs Berkaryaling
28	Jl Jambu Rt 4 Rw 2 Sumurboto Banyumanik	Bs Green Jamboe
29	Rw 7 Tinjomoyo Banyumanik	Bs Ngudi Lestari
30	Rw 6 Tinjomoyo Banyumanik	Bs Bina Karya Sejahtera
31	Rw 1 Tinjomoyo Banyumanik	Bs Tinjomoyo Asri
32	Rw 2 Tinjomoyo Banyumanik	Bs Pentul Asri
33	Rw 4 Tinjomoyo Banyumanik	Bs Sumber Rejeki
34	Rw 3 Tinjomoyo Banyumanik	Bs Resik Barokah
35	Rw 5 Tinjomoyo Banyumanik	Bs Ukel Bima
36	Rw 8 Tinjomoyo Banyumanik	Bs Rejo Makmur
37	Jl Rasamala Barat No. 132 Rt3 Rw Iv	Bs Guyub Rukun
38	Srondol Wetan Banyumanik	Bs Mangga
39	Rw 02 Kel. Ngesrep	Bs Trangkil Lestari
40	Sumurboto	Mandiri Sejahtera
41	Srondol Wetan Banyumanik	Wijaya Kusuma Rw 16
42	Srondol Wetan, Ranyijmanik	Anggrek Rw 16
43	Srondol Wetan, Banyumanik	Anggrek Rw 07
44	Srondol Wetan Banyumanik	Sukun Makmur
45	Srondol Kulon, Banyumanik	Mandiri Resik Apik
46	Srondol Kulon Banyumanik	Mandiri Bina Sejahtera Abadi
47	Srondol Kulun, Banyumanik	Mandiri Sumber Makmur
48	Srondol Kulon, Banyumanik	Mekar Jaya
49	Tinjomoyo, Banyumanik	Mekar Jaya
50	Banyumanik	Berkah Rw.04
51	Pedalangan, Banyumanik	Mawar Merah
52	Pedalangan, Banyumanik	Mawar Putin
53	Pedalangan Banyumanik	Dahlia
54	Pedalangan Banyumanik	Matahart
55	Pedalangan Banyumanik	Sakura
56	Pedalangan Banyumanik	Serum
57	Pedalangan, Banyumanik	Melati
58	Pedalangan, Banyumanik	Rudal Rumilah
59	Candi Rt 1 Rw 1 Candisari	Bs Melati Putth
60	Jl. Lompo Batang Raya 1 Rt. 01, Candisari	Bs Mekarsari Rw 04 Kaliwiru
61	Jln. Dr. Wahidin No. 1 10d Candisari	Bs Melati

No	Lokasi	Nama Bank Sampah
62	Jatingaleh Candisari	Bs Flamboyan Rw 06
63	Jatingaleh Candisari	Bs Jati Resik
64	Jatingaleh Candisari	Bs Tanjung Rw 05 Jatingaleh
65	Jatingaleh Candisari	Bs Rw 03 Jatin
66	Jatingaleh Candisari	Bs Srikandi Jatengaleh
67	Jomblangsari 1 Rt 1 Rw 1 Jomblang Candisari	Bs Raflesia
68	Kinibalu Barat No 50 Candisari	Bs Apl Jomblang
69	Jomblang Rw 13, Candisari	Bs Melati Apl Jomblang Rw 13
70	Jomblang, Candisari	Bs Serum Api, Jombiang Rw Ii
71	Jomblang, Candisari	Bs Mentari Jomblang Rw 05
72	Jomblang, Candisari	Bs Alamanda Apl Jomblang Rw
73	Jomblang, Candisari	Bs Anggrek 14 Apl Jomblang
74	Jomblang, Candisari	Bs Anggrek 9 Apl Jomblang Rw
75	Jomblang, Candisari	Bs Karangpanas Rt 06
76	Jomblang, Candisari	Bs Lestari Apl Jomblang Rw 6
77	Tegalsari Rw 4 Candisari	Bs Mugi Berkah Sari
78	Jln. Kagok Dalam 111 Rt 1 Rw 6 Candisari	Bs Waras
79	Jatingaleh Candisari	Bs Barokah
80	Jatingaleh Candisari	Bs Flamboyan
81	Kaliwiru Candisari	Bank Sampah Melati
82	Candi, Candisari	Bank Sampan Duo Rw 2
83	Candi Candisari	Bank Sampah Kamboja Rt
84	Candi Candisari	Kenanga Rt 04 Rw 10
85	Candi Candisari	Mawar Rt 01 Rw 10
86	Candi Candisari	Melati Rt 02 Rw 10
87	Candi, Candisari	Anggrek Rt 03 Rw 10
88	Candi, Candisari	Bank Sampan Rukun
89	Candi, Candisari	Bank Sampaii Sumber Rejeki
90	Candi Candisari	Bank Sampah Makmur
91	Candi, Candisari	Bank Sampah Bersih Berkah
92	Jl Tampomas Selatan 3 No 17 Rt 6 Rw 1 Petompon, Gajahmungkur	Bs Durian
93	Jl Talangsari Raya No 23 Rt 4 Rw 3 Bendan Duwur, Gajahmungkur	Bs Maju Lestari
94	Rw 04 Sampangan, Gajahmungkur	Bs Lumintu Rw 04
95	Rt 01 Rw 04, Gajahmungkur	Bs Dewi Kunthi
96	Lempongsari Rw 3, Gajahmungkur	Bs Srikandi
97	Lempongsari Rw 05, Gajahmungkur	Pilah Sampah Rw 05
98	Sampangan Rw 07 Gajahmungkur	Bs Sapta Upaya Guna
99	Sampangan Rw 01 Gajahmungkur	Pilah Sampah Rw 1
100	Jln. Patiunus 3, Pandean Lamper, Gayamsari	Ds Dina Lestari
101	Rt 5 Rw 1 Siwalan Gayamsari	Bs Anugrah
102	Sawah Besar Gayamsari	Matahari
103	Gayamsari	Melati
104	Jln Widuri 1 Rt 9 Rw 5 Genuksari	Bs Rejo Asri
105	Jln. Widuri Raya Rt 2 Rw 10 Genuksari	Bs Mandiri
106	Genuksari Rt 4 Rw 7	Bs Mandiri 7
107	Genuk Sari Rt 7 Rw 8	Bs Makmur Abadi
108	Sembungharjo Rw 10 Genuk	Bs Merar Abadi
109	Sembungharjo Rw7 Genuk	Bs Sarta Jaya
110	Genuksari	Bs Mugi Berkah
111	Penggaron Lor Rw 1, Genuk	Bs Jaya Makmur
112	Bangetayu Wetan Rw 8 Genuk	Bs Maju Mapan 5758
113	Banjardowo Genuk	Bs Barokaii
114	Bangetayu Kulon Genuk	Bank Sampah Widuri Baru 3
115	Karangroto Genuk	Sido Resik
116	Kudu Genuk	Bank Sampah Rw 07
117	Semoujngiiarjo, Genuk	Bank Sampah Sedulur
118	Geoangsari, Genuk	Gerbang Berkah
119	Mutiharjo Lor, Genuk	Flamboyan
120	Bangetayu Wetan, Genuk	Berkasa Sampah
121	Bangetayu Wetan Genuk	Barokah

No	Lokasi	Nama Bank Sampah
122	Cepoko Rt 4 Rw 1 Gunungpati	Bs Mawar
123	Karaggeneng Rt 3 Rw 2, Sumurrfajo, Gunungpati	Bs Bangkit Sejahtera
124	Sekaran Rw7 Gunungpati	Bs Mandtri Berkah
125	Sekaran Rw 5 Gunungpati	Bs Sumber Rfajeki
126	Mangunsari Rw 4 Gunungpati	Bs Semangat Sejahtera
127	Ngijo Rw 3 Gunungpati	Bs Kemuning
128	Pakintelan Rt 2 Rw 3, Gunungpati	Bs Mentari
129	Pakintelan Rw 5, Gunungpati	Bs Mbangun Krajan
130	Patemon Rw 7, Gunungpati	Bs Graha Mandiri
131	Patemon Rw 3 Gunungpati	Bs Eling Resik
132	Patemon Rw 5, Gunungpati	Bs Mawar
133	Plalangan Rt 4 Rw 1, Plalangan, Gunungpati	Bs Mulya Sejahtera
134	Kalialang Baru Rt 1 Rw 9, Gunungpati	Bs Seroja Asri
135	Sukorejo, Gunungpati	Bs Lestari
136	Sumurgunung Rt 6 Rw 5 Sumurrejo Gunungpati	Bs Guyub Rukun
137	Pengkol Rw 01, Mangunsari Gunungpati	Bs Alamanda
138	Puskesmas Sekaran, Gunungpati	Bs Sekar
139	Pongangan Rw 5 Gunungpati	Bs Jatsari Maju
140	Rt 1 Rw 2 Sekaran, Gunungpati	Bs Sekar Anggrek
141	Rw 111 Sekaran Gunungpati	Bs Sekar Mandiri
142	Rt 3 Rw 4 Pakintelan, Gunungpati	Bs Berkah
143	Rejosari Rt 5 Rw 1 Gunungpati	Bs Luhur
144	Perum Green Village Rt 8 Rw 3 Gunungpati	Bs Kemuning
145	Rt 5 Rw 2 Ingijw Gunungp/Vi'i	Bs Mendak Madam Center
146	Rt 1 Rw 2 Ngijo Gunungpati	Bs Kinanthi
147	Kelurahan Nongkosawit Gunungpati	Bs Sido Mukti
148	Rt 2 Rw 3 Cepoko, Gunungpati	Bs Melati Putih
149	Rt 2 Rw 3 Cepoko, Gunungpati	Bs Jagasari
150	Rw 1 Gunungpati	Bs Tanjungsari
151	Rw 2 Gunungpati	Bs Abimanyu
152	Rw 3 Gunungpati	Bs Dawis Mawar 2
153	Rw 4 Gunungpati	Bs Daiilia Lestari
154	Rw 5 Gunungpati	Bs Anggrek Sejahtera
155	Rw 6 Gunungpati	Bs Cempaka
156	Rw 7 Gunungpati	Bs Sakura
157	Rw 8 Gunungpati	Bs Ris Una
158	Rw 9 Gunungpati	Bs Ceplok Piring
159	Rt 1 Rw 9 Gunungpati	Bs Matahari
160	Desa Tanjungsari Rt 02/Rw02, Gunungpati	Bs Sumber Rejeki
161	Rw 10 Gunungpati	Bs Makmur Barokah
162	Rw 4 Pongangan Gunungpati	Bs Sek/Wan Rw 4
163	Pakintelan Rw 6 Gunungpati	Bs Mekar Jaya
164	Kalialang Lama Rt 7 Rw 1 Gunungpati	Bs Darlink Setia
165	Kalialang Lama Rt 2 Rw 1 Gunungpati	Bs Marsudi Amrih Lestari
166	Kalialang Lama Rt 4 Rw 1, Gunungpati	Bs Pondok Rejo
167	Jl Kalimasada Gg Arjuna 11 Desa Persen	Bs Khanti Roso Peduli
168	Rw 1 Pongangan Gunungpati	Bs Berkah
169	Rw 1 Rt4 Sukorhajo Gunungpati	Bs Quarter Ceria 1
170	Rw 1 Rt2 Sukorejo Gunungpati	Bs Quarter Ceria 2
171	Rw 12 Rt 1 Sukorejo, Gunungpati	Bs Pusar 1
172	Rt 1 Rw 10, Sukorejo Gunungpati	Bs Mekar Sari
173	Perumahan Trangkil Savia Mitra B77 Gunungpati	Bs Mitra Berkarya
174	Rw 10 Rt 7 Sukorejo Gunungpati	Ng Daya Pesona Asr!
175	Rt 9 Rw 5 Sukorejo Gunungpati	Bs Matahari
176	Rw 8 Rt 4 Sukorejo Gunungpati	Bs Sumber Rdjeki
177	Rw 4 Rt 3 Sekaran Gunungpati	Bs Berkah
178	Rt9 Rw 5 Sekaran, Gunungpati	Bs Berkah Mandiri
179	Rt 1 Rw 9 Sekaran, Gunungpati	Bs Sekar Mawar
180	Perum Greenwood Sadang, Gunungpati	Bs Greenwood
181	Terwidi Rt 02/ Rw 03, Gunungpati	Bs Terwiioi Cinta Bersih
182	Nongkosawit Rw 03 Gunungpatj	Bs Setiti
183	Kalisegoro Gunungpati	Bank Sampah Buncis
184	Kalisegoro Gunungpati	Bank Sampah Melati Amanah

No	Lokasi	Nama Bank Sampah
185	Kalisegoro. Gunungpati	Bank Sampah Dumi Leastari
186	Kalisegoro, Gunungpati	Bank Sampah Nuruk Barokah
187	Kalisegoro Gunungpati	Bank Sampah Minje
188	Nongkosawit Gunungpati	Resik Berkah
189	Nongkosawit Gunungpati	Makrnur
190	Nongkosawit, Gunungpati	Makmur Sejahtera
191	Nongkosawit. Gunungpati	Mckar Sejahtera
192	Nongkosawit, Gunungpatj	Pelan
193	Pongangan, Gunungpati	Bank Sam Ah Kcnan A
194	Pongangan, Gunungpati	Erticta
195	Perum Kandri Pesona Asri	Resik Ngrljekeni
196	Rt 8 Rw 4. Kandri, Gunungpati	Popodang
197	Rt 3 Rw 4 Kandri, Gunungpati	Merah
198	Rt 6 Rw 4 Kandrt, Gunungpatt	Ketilang
199	Rt 7 Rw 4 Kandri Gunungpati	Mitra Jaya
200	Rt .5 Rw 4 Kandri, Gunungpati	Mdri'atl
201	R'1'4 Rw 2 Kandri, Gunungpatt	Resik Becir
202	Rt 3 Rw 3 Kandri, Gunungpati	Berseri
203	Rt 9 Rw 4 Kandri, Gunungpati	Nuri
204	Rt 3 Rw 2 Kandri, Gunungpati	Parling Berseri
205	Jatirejo, Gunungpati	Kokolaka 1-5
206	Jatirejo Gunungpati	Kambera 1-3
207	Jatirejo, Gunungpati	K 'Cra 1-3
208	Jatirejo, Gunungpati	Kajangkris 1-3
209	Bubakan Rt 1 Trw 2 Mijen	Bs Lancar Rejeki
210	Bubakan Rw 4, Mijen	Bs Teras Baliku Hijau
211	Cangkiran Rw 8 Mijen	Bs Run Make Full
212	Cangkiran Rw 7, Mijen	Bs Intan Permata
213	Cangkiran Rw 4 Mijen	Bs Berkah Barokah
214	Sebumi Rt 1 Rw 1, Karangmalang, Mijen	Bs Mekar Sari
215	Wonolopo Rw 8, Mijen	Bs Aster
216	Kantor Kelurahan Mijen	Bs Lumintu
217	Wonolopo Rw 4, Mijen	Bs Kumbang Hias
218	Tambangan Rw 1, Mijen	Bs Mugi Lancar
219	Wonolopo Rw 6 Mijen	Bs Asa Mandiri
220	Jatibarang Rw 3, Mijen	Bs Jatibarang Rw 3
221	Perum Bsp Rt 4 Rw 3 Mijen	Bs Kusuma
222	Kedungpane Rt 07 Rw 05 Mijen	Bs Berkah Sfajahtera
223	Griya Mijen Permai Rt 9 Rw 7	Bs Melati 1
224	Griya Mijen Permai Rt 11 Rw 7	Bs Criya Bersiiæ Mandiri
225	Mijen Permai Rt 4 Rw 7	Bs Dahlia
226	Jl Rambutan 2b Lemah Mendak Rt 6 Rw	Bs 66 Jaya
227	Mijen Rt 3 Rw 1	Bs Mbok Gemi
228	Perum Vila Mijen Permai Rt 5 Rw 6	Bs Sumber Rejeki
229	Perum Asri Nirwana Rt 4 Rw 6	Bs Nirwana
230	Mijen Rt 1 Rw 2	Bs Burkah
231	Mijen Rt 2 Rw 2	Bs Makmur Jaya
232	Mijen Rt 3 Rw 2	Bs Gotong Royong
233	Mijen Rt 12 Rw 7	Bs Daun Salam
234	Mijen Rt 1 Rw7	Bs Mutiara
235	Mijen Permai Blok C Rt 5 Rw 7	Bs Remaja Kemuning
236	Griya Mijen Permai Rt 9 Rw 7	Bs Dawis Melati 2
237	Mijen Permai Iii 06 Rw 7	Bs Anggrek
238	Pongangan Mijen	Bs Jatisari Maju
239	Griya Mtjen Permai K 17 Rt 09 Rw 7	Bs Melati 3
240	Rw 5 Mijen	Bs Bintang Kfŕjora
241	Mijen Harmoni	Bs Berkah Barokah (Mijen
242	Rw 1 Mijen	Bs Limbaii Berkah Asalam
243	Rt 04 Rw 05 Duduhan Meteseh	Bs Mekar Sejahtera
244	Cangkiran Mijen	Citra Rejeki Rw 2
245	Bubakan Mijen	Village Asri Rw 5
246	Polaman Mijen	Bank Sampah Resik Sejahtera
247	Purwosari Mijen	Tpst 3 R Sidorahayu

No	Lokasi	Nama Bank Sampah
248	Mijen	Berkah Manfaat
249	Mijen	Lumbung Arto
250	Mijen	Harmoni Resik Becik
251	Mijen	Berkah Mandiri
252	Mijen	Mutiara
253	Mijen	Dahlia
254	Mijen	Barokah
255	Kedungpane Mijen	Bank Sampah Sri Kandi
256	Kedungpane Mijen	Bank Sampah Rejeki Barokah 1
257	Kedungpane Mijen	Bank Sampah Rejeki Barokah 2
258	Kedungpane Mijen	Bank Sampah Berkah Abadi
259	Kedungpane Mijen	Bank Sampah Harapan Jaya
260	Ngadirgo, Mijen	Bank Sampah Rw 02
261	Ngadirgo, Mijen	Bank Sampah Rt 01 Rw 06
262	Ngadirgo, Mijen	Bank Sampah Rt 02 Rw 06
263	Ngadirgo Mijen	Bank Sampah Rt 01 Rw 09
264	Ngadirgo, Mijen	Bank Sampah Rt 03 Rw 09
265	Pesantren, Mijen	Bank Sampah Rw 1
266	Pesantren, Mijen	Bank Sampah Rw Tv
267	Kelurahan Kalipancijr, Ngaliyan	Bs Kelurahan Indria Jaya
268	Bambankerep Rw 3 Ngaliyan	Bs Lestari Barokah Mandiri
269	Ngaliyan Rw 5, Ngaliyan	Bs Melati
270	Podorejo Rt 1 Rw 1 Ngaliyan	Bs Tri Jaya Abadi
271	Podorejo Rw 3, Ngaliyan	Bs Palir Jaya
272	Podorejo Rw 2, Ngaliyan	Bs Kampung Go Green Ngisor Asem
273	Podorajo Rw 4 Ngaliyan	Bs Nusa Indan
274	Podorajo Rw 5, Ngaliyan	Bs Teratai
275	Tambakaji Rw 1, Ngaliyan	Bs Melati Rw 1 Tambakaji
261	Ngadirgo, Mijen	Bank Sampah Rt 01 Rw 06
262	Ngadirgo, Mijen	Bank Sampah Rt 02 Rw 06
263	Ngadirgo Mijen	Bank Sampah Rt 01 Rw 09
264	Ngadirgo, Mijen	Bank Sampah Rt 03 Rw 09
265	Pesantren, Mijen	Bank Sampah Rw 1
266	Pesantren, Mijen	Bank Sampah Rw Tv
267	Kelurahan Kalipancijr, Ngaliyan	Bs Kelurahan Indria Jaya
268	Bambankerep Rw 3 Ngaliyan	Bs Lestari Barokah Mandiri
269	Ngaliyan Rw 5, Ngaliyan	Bs Melati
270	Podorejo Rt 1 Rw 1 Ngaliyan	Bs Tri Jaya Abadi
271	Podorejo Rw 3, Ngaliyan	Bs Palir Jaya
272	Podorejo Rw 2, Ngaliyan	Bs Kampung Go Green Ngisor Asem
273	Podorajo Rw 4 Ngaliyan	Bs Nusa Indan
274	Podorajo Rw 5, Ngaliyan	Bs Teratai
275	Tambakaji Rw 1, Ngaliyan	Bs Melati Rw 1 Tambakaji
276	Wates Rt 7 Rw 2, Ngaliyan	Bs Mekar Karya Remaja
277	Wonosari Rw 14, Ngaliyan	Bs Makmur Jaya
278	Tambakaji Rw 12, Ngaliyan	Bs Ajiguna
279	Tambakaji Rw 8, Ngaliyan	Bs Sami Aji
280	Kelurahan Bringin, Ngaliyan	Es Pusya Nyidra
281	Tambakaji Ngaliyan	Bs Karya Bunda
282	Rw 12 Podorejo Ngaliyan	Bs Utama
283	Rw 11 Podorejo Ngaliyan	Berkah Barokah
284	Rw 9 Podorejo Ngaliyan	Bs Berkahe Sampah
285	Jl Borobudur Barat 4 Rt 4 Rw 14 Purwoyoso	Bs Mandiri Berkah
286	Rt 11 Rt 111 Purwoyoso Ngaliyan	Bs Go Green Sriwibowo
287	Purwoyoso Ngaliyan	Sari Asri
288	Purwoyoso Ngaliyan	Srikaton
289	Purwoyoso Ngaliyan	Merak
290	Purwoyoso Ngaliyan	Purwokeling
291	Wonosari Ngaliyan	Mekar Jaya
292	Wonosari Ngaliyan	Delima Asri
293	Wonosari Ngaliyan	Mangga Asri
294	Wonosari Ngaliyan	Durian Asri

No	Lokasi	Nama Bank Sampah
295	Wonosari Ngaliyan	Man
296	Wonosari Ngaliyan	Kiwi Asri
297	Wonosarj Ngaliyan	Resik Asri
298	Wonosari Ngaliyan	Nanas Asri
299	Wonosari Ngaliyan	Elok Mu O
300	Banbankerep Ngaliyan	Bank Sampah Mugi Lancar
301	Banbankerep Ngaliyan	Bank Sampah Berkah Rw.Lv
302	Banbankerep Ngaliyan	Bank Sampah Sehat Mandiri
303	Kalipancur Ngaliyan	Bank Sampah Cahaya Teratai
304	Kalipancur Ngaliyan	Bank Sampah Basuki
305	Kalipancur Ngaliyan	Bank Sampah Cipto Mulyo
306	Kalipancur Ngaliyan	Bank Sampah Mutiara Tiga
307	Kalipancur Ngaliyan	Bank Sampah Barokah
308	Kalipancur Ngaliyan	Bank Sampah Anggarda
309	Kalipancur Ngaliyan	Bank Sampah Mugi Berkah
310	Kalipancur Ngaliyan	Bank Sampah Hasta Mutiara
311	Kalipancur Ngaliyan	Bank Smapah Taman Candi
312	Bringin Ngaliyan	Berlian Bringin
313	Gondoriyo Ngaliyan	Bank Sampah Berman
314	Gondoriyo Ngaliyan	Bank Sampah Seruni
315	Gondoriyo Ngaliyan	Bank Sam
316	Podorejo Ngaliyan	Bs Kaliancar
317	Podorejo Ngaliyan	Bs Sejahtera
318	Podorejo Ngaliyan	Bs Melati
319	Tambakaji Ngaliyan	Resik Biccik - Rw 11
320	Tambakaji Ngaliyan	Walisongo - Rw 111
321	Tambakaji Ngaliyan	Wahyu Asri - Rw Vi
322	Krajan 1 Rt 2 Rw 3, Mangkang Kulon, Tugu	Bs Melati
323	Kauman Rt 1 Rw 4, Mangkang Kulon, Tugu	Bs Mawar
324	Jln. Tegal Lirtk Rt 4 Rw 5, Mangkang Kulon Tugu	Bs Amarilis
325	Perum Korpri Tugurejo T 27rt 3 Rw 5	Bs Mawar Merah
326	Jln. Tapak Raya Tugurejo, Tugu, Kota Semarang	Bs Induk
327	Tugurejo Tugu	Bs Alamanda
328	Jerakah, Tugu	Apik Resik
329	Karanganyar, Tugu	Wijaya Kusuma
330	Randugarut Tugu	Margowidodo 3
331	Mangunharjo, Tugu	Arto Moro Rt 1 Rw 2
332	Mngkang Kulon, Tugu	Asyifa
333	Randugarut Tugu	Margowidodo 1
334	Randugarut Tugu	Margowidodo 5
335	Randugarut, Tugu	Margowidodo 7
336	Randugarut Tugu	Margowidodo 8
337	Randugarut, Tugu	Margowidodo 9
338	Randugarut Tugu	Margowidodo 10
339	Randugarut Tugu	Margowidodo 11
340	Randugarut Tugu	Margowidodo 12
341	Jln. Wologito 1 Rt 1 Rw 1, Kembangarum,	Bs Sekar Arum
342	Jl Borobudur Raya No 17 Rt 4 Rw 8 Kembangarum Semarang Barat	Bs Limbah Berkah
343	Jln. Cokrokembang 11, Krobokan, Semarang Bapat	Bs Resik Becik
344	Jl Mintojiwo 1 Rt 3 Rw 4 Gisikdrono Semarang	Bs Sejahtera Gisikdrono
345	Jl Ronggolawe 3 Gisikdrono Semarang Barat	Bs Mekar Sari
346	Bongsari Rt 9 Rw 8, Semarang Barat	Bs Rt 9 Rw 8
347	Rt 01-06 Rw 01, Ngemplak Simongan, Semarang	Ijo Royo Royo
348	Rt 07-12 Rw 01 Ngemplak Simongan, Semarang	Berkah
349	Rt 03 Rw 02 Ngemplak Simongan, Semarang Barat	Berkah
350	Rt 01-09 Rw 03 Ngemplak Simongan	Lily Mekar Jaya
351	Rt 03 Rw 04 Ngemplak Simongan, Semarang Barat	Rukun Marmur
352	Rt 07 Rw 04 Ngemplak Simongan, Semarang Barat	Cempaka 1
353	Rt 01-09 Rw 05 Ngempiak Simongan, Semarang	Bs Rtoi Rw 05
354	Rt 07 Rw 06 Ngemplak Simongan, Semarang Harat	Resik Becik
355	Rt 02 Rw 08 Ngemplak Simonoan. Semarang Barat	Rahayu
356	Rt 08 Ngemplak Simongan, Semarang Barat	Nusa Indan

No	Lokasi	Nama Bank Sampah
357	Rt 05 Rw 08 Ngemplak Simongan, Semarang Barat	Anggrek
358	Ngemplang Simongan Semarang Barat	Soringin
359	Salaman Mloyo Rt 01 Rw 03, Semarang Barat	Pilah Sampah Rtoi
360	Salaman Mloyo Rt 02 Rw 06, Semarang Barat	Pilaii Sampah Rt 02
361	Krobokan Rw 12 Semarang Barat	Sedekah Sampah Rw 12
362	Tambak Iiarjo Rt 01 Rw 07, Semarang Barat	Bs Rw 7 Rt 1
363	Rw 1 Kalibanteng Kulon, Semarang Barat	Bs Resik Berkah
364	Rw 3 Kalibanteng Kulon, Semarang Barat	Bs Rw 3
365	Rw 1 Kalibanteng Kulon, Semarang Barat	Bs Rejeki Bangkit
366	Kelurahan Gisikdrono, Semarang Barat	Bs Maju Lancar
367	Pilaii Sampah Rt 8 Rw 6, Semarang Barat	Bs Sukses
368	Pilah Sampaii Rt 7 Rw 5, Semarang Barat	Bs Kencana
369	Jimn. 'I'anggijl Asri No 64 Rt 7 Rw 2, Pedurungan	Bs Aisah
370	Taman Liman Mukti Rw 6, Pedurungan	Bs Mekar Jaya
371	Plamongan Sari V Rt 3 Rw 9 Pedurungan	Bs Asri Sari
372	Kel. Gemah Rt 4 Rw 8 Pedurungan	Bs Usaha Mandiri
373	Jl. Sendangsari XII Rt 06 Kecamatan Kalicari Pedurungan	Bs Kalicari Asrt
374	Muktiharjo Kidul Pedurungan	Bank Sampah Tri Asih
375	Penggaron Kidul Pedurungan	Bank Sampah Tunas Mul A
376	Penggaron Kidul Pedurungan	Bank Sampah Rt01 01
377	Penggaron Kidul Pedurungan	Balik Sampan Rt 03 Rw 3
378	Pedurungan Lor Pedurungan	Rw.01
379	Pedurungan Lor Pedurungan	Rw.02
380	Pedurungan Lor Pedurungan	Rw.03
381	Pedurungan Lor Pedurungan	Rw.04
382	Pedurungan Lor Pedurungan	Rw.05
383	Pedurungan Lor Pedurungan	Rw.07
384	Pedurungan Lor Pedurungan	Rw.08
385	Pedurungan Lor Pedurungan	Rw.09
386	Pedurungan Tengah	Bank Sampah Mangga
387	Pedurungan Tengah	Bank Sampah Mawar Kusuma
388	Pedurungan Tengah	Bank Sampah Ganesha Mulya
389	Pedurungan Tengah	Bank Sampah Pesona Berkah
390	Lamperkidul Rw 1, Semarang Selatan	Ds Dina Kelola
391	Wonodri Rw 5 Semarang Selatan	Bs Sendang Makmur
392	Asrama Tni Ad Kalisari Rt 01/05, Semarang	Bs Rahayu (Cikal Bestari)
393	Lemah Gempal Gg V, Barusari, Semarang Selatan	Bs Rekat
394	Jl Barusari 1 No 38 Semarang Selatan	D Angkasa
395	Bulustalan Semarang Selatan	Randalas
396	Bulustalan, Semarang Selatan	Dewi Bulan
397	Randusari, Semaranc Selatan	I-Iarum Sari
398	Randusari, Semarang Selatan	Mckarsari
399	Randusari, Semarang Selatan	Nusa Indah
400	Randusari, Semarang Selatan	Kembang Sepatu
401	Randusari, Semarang Selatan	Melati Husada
402	Randusari, Semarang Selatan	Menur
403	Randusari, Semarang Selatan	Mugi Lestari
404	Wonodri, Semarano Seiatan	Rukun
405	Wonodri, Semarano Seiatan	Wonodri Orgnnik
406	Lamper Lor Semarnag Selatan	Rw 2
407	Lamper Lor Semarnag Selatan	Rt 3 Rw 3
408	Lamper Lor Semarnag Selatan	Rw 5 R' Ol- 06
409	Lamper Kidul Semarnag Selatan	Bina Fina
410	Lamper Tengah Semarnag Selatan	Herkah Makmur Rw 001
411	Lamper Tengah Semarnag Selatan	Melat) Gumrcgah Pw 004
412	Lamper Tengah Semarnag Selatan	Anggmuyersinnr Rw 008
413	Kimangsunsarkoro No 22 Semarang Tengah	Bs Mulyo Sedoyo
414	Jl. Trungguli 3/23 Rt 2 Rw 2 Semarang Tengah	Bs Mandiri Trengguli
415	Kranggan Semarang Tengah	Sioomakmur
416	Bangunharjo Semarang Tengah	Byyung Sutra
417	Purwodinatan, Semapang Tengah	Bank Sampah Semut
418	Pekunden Semarang Tengah	Bs. Berkah Srnoyo
419	Pekunden Semarang Tengah	Makmur Bersama

No	Lokasi	Nama Bank Sampah
420	Pendrikan Kidul Semarang Tengah	Bank Sam Ah Mandiri
421	Jln. Ronggowarsito Rt 4 Rw 3 Kp- Depo Indah Kemijen Semarang Timur	Bs Kemijen 1
422	Kp. Blusuk Rt2 Rw 11 Kemijen Semarang Timur	Bs Guyub Rukun
423	Jln. Pemai,1 3 Rw '2, Semarang Timur	Bs Pundi Sekar Melati
424	Jl Barito, Bugangan Dalam C 503A, Semarang	Bs Sekam Seiiwar
425	Bugangan, Semarang Timur	Bs Gabriel Love Pioneers
426	Bugangan, Semarang Timur	Bs Sido Makmur
427	Bugangan, Semarang Timur	Bs Bersih Jaya
428	Bugangan, Semarang Timur	Bs Germas Berseri
429	Bugangan, Semarang Timur	Bs Maju Mapan
430	Bugangan, Semarang Timur	Bs Berseri
431	Bugangan, Semarang Timur	13s Sijko Maju
432	Karang Tempel, Semarang Tiujr	Mandiri Sejahtera /
433	Karang Tempel, Semarang Tiujr	Karan Em
434	Karang Tempel, Semarang Tiujr	Barokah
435	Karang Tempel, Semarang Tiujr	Turi Makmur
436	Karangturi, Semarang Ttmur	Turi Agung
437	Rejosari Semarang Timur	Bank Sampah Rw 07
438	Rajosari, Semarang Timiur	Bank Sampah Rw 15
439	Rajosari Semarang Timur	Bank Sampah Barokah
440	Sarirejo Semarang Timur	Bank Sampah Barokah
441	Mlatiharjo Semarang Timur	Mlati Urip Berkah
442	Kemijen, Semarang Timur	Bank Sampah Rw 11
443	Kemijen, Semarang Timur	Bank Sampah Rw 02
444	Kemijen, Semarang Timur	Barokah
445	Kemijen, Semarang Timur	Arjuna
446	Kemijen Semarang Timur	Berkah Asri
447	Rejomulyo, Sdmarang Timur	Rw 06
448	Rejomulyo, Semarang Timur	Rw 07
449	Jln. Karanggawang Baru Rt 6 Rw 6,	Bs Sari Asri 1
450	Perum Sinar Waluyo, Jln. Sinar Mustika No 16 Rt 6 Rw 1 Tembalang	Bs Waluyo
451	Jln. Gemah Sari V Rt 1 Rw 4, Kedungmundu,	Ds Cemaii Ripaii
452	Pandanwangi Tengah 111 A72, Kedungmundu, Tembalang	Bs Gemah Sentosa
453	Jln. Krajan 1 Rt 6 Rw 2, Rowosari, Tembalang	Bs Seroja Rowosari
454	Hutan Sambas Rt 5 Rw 8 Sambiroto Tembalang	Bs Resik Sejahtera
455	Sendangguwo Rw 6, Tembalang	Bs Adi Dharma
456	Baskoro Rt 3 Rw 7 Tembalang	Bs Sri Rejeki
457	Tembalang	Bs Tembalang
458	Jl Sinar Kencana Timur 898 Sinar Waluyo,	Bs Guyub Rukun Rw 8
459	Jlamposari Kei 5 Rw 3 Kedungmundu Tembalang	Bs Amposari Berkah
460	Dk Genting Rt 2 Rw 6 Meteseh Tembalang	Bs Sami Berkat
461	Puki Dinar Elok Blok 018 No 4 Meteseh Tembalang	Bs Ar Rtdho
462	Mangunharjo	Sumber Urip
463	Meteseh Tembalang	Amarylis
464	Sambirototembalang	Lps Resik Mandiri
465	Mustokoweni 2 Rt 02/01, Semarang Wiara	Bs Lestari
466	Tambak Mas Rw 5, Semarang Utara	Bs Berkah
467	Beton Mas Rw VII, Semarang Utapa	Bs Sumber Manfaat
468	Mustokoweni 5 Rt 03/03, Semarang Utara	Bs Lumintu 1
469	Mustokoweni 5 Rt 03/03, Semarang Utara	Bs Lumintu 11
470	Mustokoweni 5 Rt 03/03, Semarang Utara	Bs Lumintu 111
471	Satria Selatan Uh 31 Rt 1/5, Semarang Utara	Bs Buncis
472	Brotojoyo Dalam 2 Rt 3/2, Semarang Utara	Bs Gema Bersama
473	Tanggul Mas Rw IX, Semarang Utara	Bs Guyub Rukun
474	Jl Beton Mas 11 No. 158, Semarang Utara	Bs Beton Mas
475	Bulu Lor, Semarang Utara	Bs Walinggana
476	Jl Sentiyaki 1 No 2 Rt 03/07, Semarang Utara	Bs Ikhlas
477	Purwogondo 1 Rt 01/ Rw 05, Semarang Utara	Bs Surip
478	Tambak Mulyo Rw 15, Semarang Utara	Pesona Bahari
479	Tambakrfjo Rt 03 Rw 16 Tanjung Mas Semarang	Bs Camar

No	Lokasi	Nama Bank Sampah
480	Udowo Barat Rt 2/Rw 9, Semarang Utara	Bina War A
481	Jl Erowati Tengah Rt 3/Rw 3 Semarang Utara	Bs Eropah
482	Jl Tambra Dalam 7, Semarang Utara	Bs Pundi
483	Kuningan, Semarang Utara	Sejahtera
484	Panggunglor, Semarang Utara	Berkah
485	Bulu Lor, Semarang Utara	Bina Warga
486	Bulu Lor Semarang Utara	Eropah
487	Bulu Lor Semarang Wiara	Api Jaya
488	Bulu Lor, Semarang Utara	Pilah Sampah
489	Pangkid, Semarang Utara	Gema Bersama
490	Kuningan, Semarang Utara	Libertisam
491	Purwosari, Semarang Utara	Barkah
492	Purwosari, Semarang Utara	Dni 565
493	Purwosari, Semarang Utara	Keta
494	Plombokan, Semarang Utara	Bank Sampah Nawa Sena
495	P. Lor Semarang Utara	Bank Sampah Asri Peni
496	P. Lor Semarang Utara	Bank Sampah Guyuo Rukun
497	Bululor, Semarang Utara	Bank Sampah Bina Keluarga

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2023

Kegiatan bank sampah didukung dengan adanya Kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga yang bernama Yayasan Bintari dan Dow Indonesia yang memiliki inovasi dalam pendampingan bank sampah TPS3R. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bertugas sebagai pelaksana teknis dari pengolahan sampah terpadu, pengadaan TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan menangani masalah lingkungan yang berada dibawah naungan aparat di masing- masing kecamatan sampai dengan kelurahan.

9. Persentase Volume Sampah Terangkut dari TPS ke TPA

Pembuatan jalur khusus ini berfungsi agar truk pengangkut sampah dapat mengangkut sampah menuju tempat pengolahan sampah terdekat dan dapat bergerak dengan bebas. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Semarang guna menanggulangi permasalahan sampah yang menggunung. Sampah yang sudah terangkut nantinya akan dilakukan pengolahan, salah satunya dapat menjadi pupuk yang dapat digunakan oleh petani untuk lahan pertanian. Jalur khusus truk sampah sudah dapat ditemukan di TPA Jatibarang. Kemasan produk, penggunaan bahan plastik untuk pengemas dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan bahan lain sehingga penggunaan bahan plastik sebagai kemasan produk banyak digunakan. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah terbanyak yang dihasilkan dan sulit untuk diurai sehingga berpengaruh besar menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Berikut adalah jumlah timbulan sampah di Kota Semarang.

Gambar 2.18 Timbulan Sampah Kota Semarang

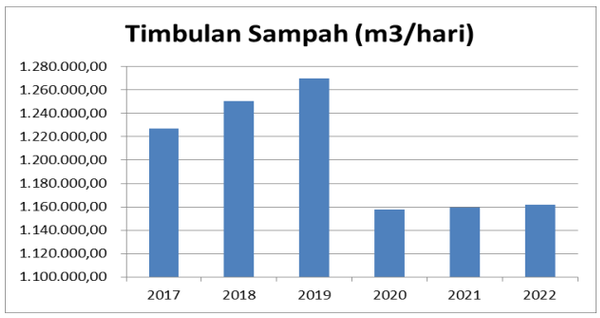

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2022

Gambar 2.19 Jalur Khusus Truk Sampah di TPA Jatibarang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Terdapat TPS3R oleh masyarakat sebanyak 16 unit, sedangkan TPST dan TPS3R milik pemkot dan swsta sebanyak 6 unit. Kondisi terkait perkotaan di Kota Semarang. Pertama terkait timbulan sampah. Timbulan sampah Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 1.182,57 ton/hari dari penduduk Kota Semarang sebanyak 1.659.975 jiwa.

Tabel 2.19 Perkembangan Timbulan Sampah Kota Semarang

Tahun	Timbulan sampah (ton/hari)
2014	1.075,82
2015	1.100,66
2016	1.105,85
2017	1.209,61
2018	1.232,39
2019	1.251,71
2020	1.276,74
2021	1.180,14
2022	1.182,57
2023	1.159,59

Sumber: Analisis penyusun, 2023

Kemudian terjadi peningkatan timbulan sampah sebesar 96,60 ton/hari per tahun atau 38.076,8 ton/tahun.

Tabel 2.20 Analisis Laju Timbulan Sampah

Tahun	ton/hari	Δ timbulan sampah (ton/hari)
2014	1.075,82	-
2015	1.100,66	24,83
2016	1.105,85	5,20
2017	1.209,61	103,76

Tahun	ton/hari	Δ timbulan sampah (ton/hari)
2018	1.232,39	22,78
2019	1.251,71	19,32
2020	1.276,74	25,03
2021	1.180,14	(96,60)
2022	1.182,57	2,43
2023	1.159,59	(22,98)
	Jumlah	**83,68**
	Rerata	**8,3**

Sumber: Analisis penyusun, 2023

Dimana Laju timbulan sampah Kota Semarang sebesar 8,3 m3/hari dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Besaran rerata timbulan sampah domestik sebesar 2,68 l/orang/hari, dan sampah non-domestik sebesar 13,54 l/unit/hari. Besaran rerata timbulan sampah ini didapatkan dari pekerjaan Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang tahun 2022. Komposisi sampah domestik didapat persentase volume organik 23,40% dan anorganik 76,60%. Sedangkan untuk sampah non Domestik, memiliki komposisi volume organik 24,59% dan anorganik 75,41%. Dari kedua jenis sampah (sampah Domestik dan sampah non Domestik) didominasi oleh sampah anorganik Besaran komposisi sampah ini didapatkan dari pekerjaan Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang tahun 2022. Jenis sampah plastik untuk kegiatan domestik dan non domestik memiliki proporsi diatas 42,31% dari jenis sampah non-compostable. Besaran komposisi sampah ini didapatkan dari pekerjaan Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang tahun 2022.

Gambar 2.20 Komposisi Sampah Kota Semarang

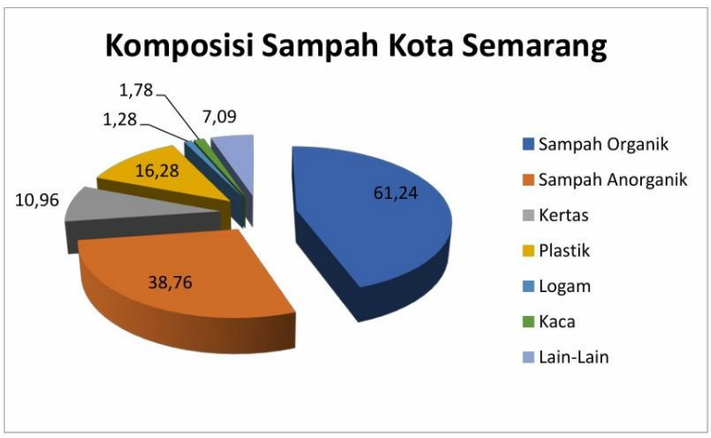

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

Total timbulan sampah pada tahun 2023 adalah 431.534,65 ton/tahun dengan sampah yang dapat ditangani sebesar 72,01% dan jumlah pengurangan sampah sebesar 27,02% dari total timbulan sampah. Persentase sampah terkelola 99,19% dan sampah tidak terkelola 0,81%. Sampah yang tidak terkelola bisa disebabkan karena masih ada yang melakukan pembuangan liar. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah Kota Semarang terdiri dari sarana pengumpulan (truk, truk tinja, becak sampah, kontainer sampah, TPS/depo, IPLT, dan lain-lain), TPST, dan Tempat Pengolahan Sampah. Tarif pengangkutan pembuangan langsung ke Tempat Pembuangan Akhir rumah tangga dengan kelas V sebesar Rp 3.000,00/bulan, Kelas III dan IV sebesar Rp 9.000,00/bulan, kelas I sebesar Rp 12.000,00/bulan. Pemrosesan

akhir sampah terdapat TPA Jatibarang. Luas TPA Jatibarang sebesar 46,183 Ha, dengan daya tampung sebesar 461.800 m3 sampah, volume eksisting 23.769,16 m3/hari.

Gambar 2.21 Pesebaran TPS Kota Semarang

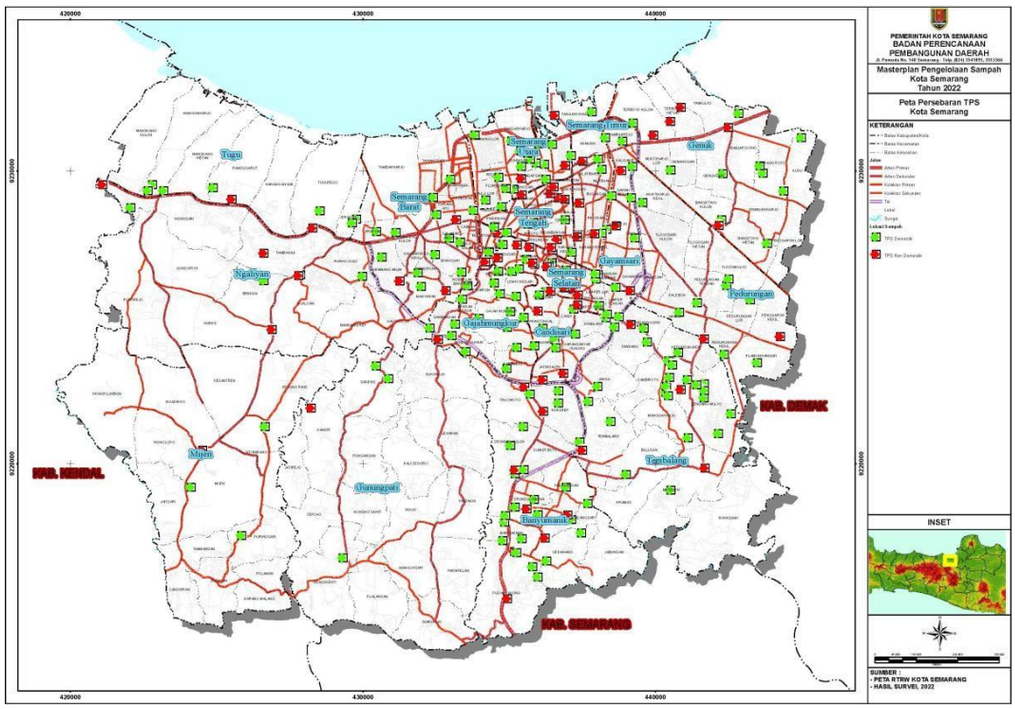

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

Tabel 2.21 Lokasi TPS3R

No.	Lokasi	Tahun	Nama Fasilitasi	Pengelola
1	Jatisari Raya	2023	PT KARYADEKA ALAM LESTARI	Masyarakat
2	Muktiharjo Lor	2022	TPS 3R Pool Timur	LSM
3	Tembalang	2022	TPS 3R Undip	LSM
4	Tohir	2022	TPS 3R Dadi Resik	LSM
5	Akasia 1	2022	TPS 3R Ngudi Kamulyan	Masyarakat
6	Polaman	2022	TPS 3R Polaman Resik Sejahtera	LSM
7	Mijen	2022	TPS 3R BSB Mijen	LSM
8	Jalan Brigjend Sudiarto	2022	TPS 3R Kelurahan Gemah	Pemda
9	Purwosari	2022	TPS 3R Sido Rahayu	LSM
10	Wanamukti	2022	TPS 3R Ben Resik	LSM
11	Mangkang Kulon	2022	TPS 3R Kampung Pilah Sampah	LSM
12	Mukti Asih III	2022	TPS 3R Mukti Asih	LSM
13	Jl. Tirto Agung	2022	TPS 3R Pedalangan Bersinar	LSM
14	JL. Raya Sekaran	2022	TPS 3R UNNES	LSM
15	Jatisari Raya	2022	PT KRAYADEKA ALAM LESTARI	Masyarakat
16	Jalan Brigjend Sudiarto	2021	TPS 3R Kelurahan Gemah	Pemda
17	Akasia 1	2021	TPS 3R Ngudi Kamulyan	LSM
18	Purwosari	2021	TPS 3R Sido Rahayu	LSM
19	Mukti Asih III	2021	TPS 3R Mukti Asih	LSM
20	Jl. Tirto Agung	2021	TPS 3R Pedalangan Bersinar	LSM
21	JL. Raya Sekaran	2021	TPS 3R UNNES	LSM
22	Jatisari Raya	2021	TPS 3R PT. Karyadeka Alam Lestari	LSM
23	Tohir	2021	TPS 3R Dadi Resik	LSM

Sumber: DLH Kota Semarang, 2022

Gambar 2.22 Persebaran TPS 3R Kota Semarang

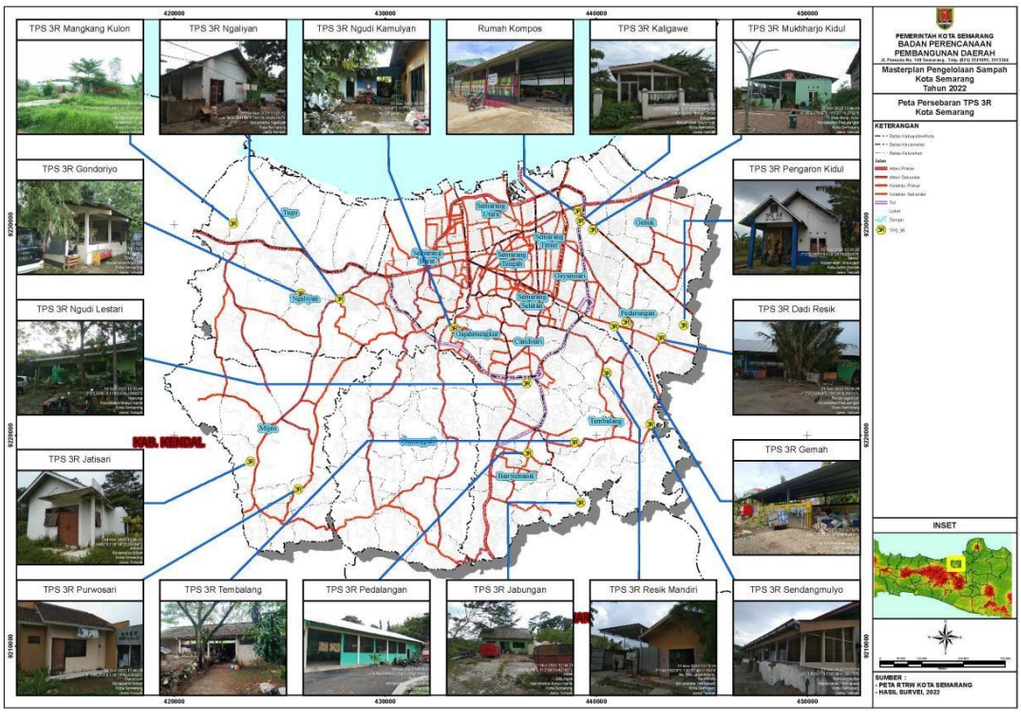

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

Gambar 2.23 Pesebaran TPST Kota Semarang

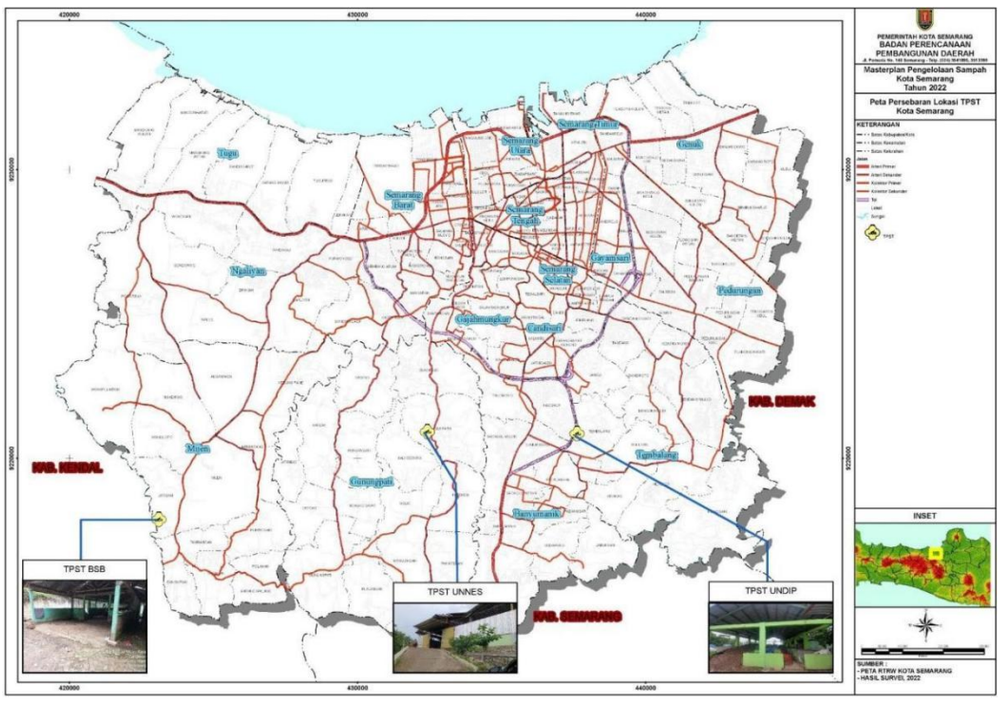

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

Gambar 2.24 Peta Pembagian Zona Pelayanan Persampahan Kota Semarang

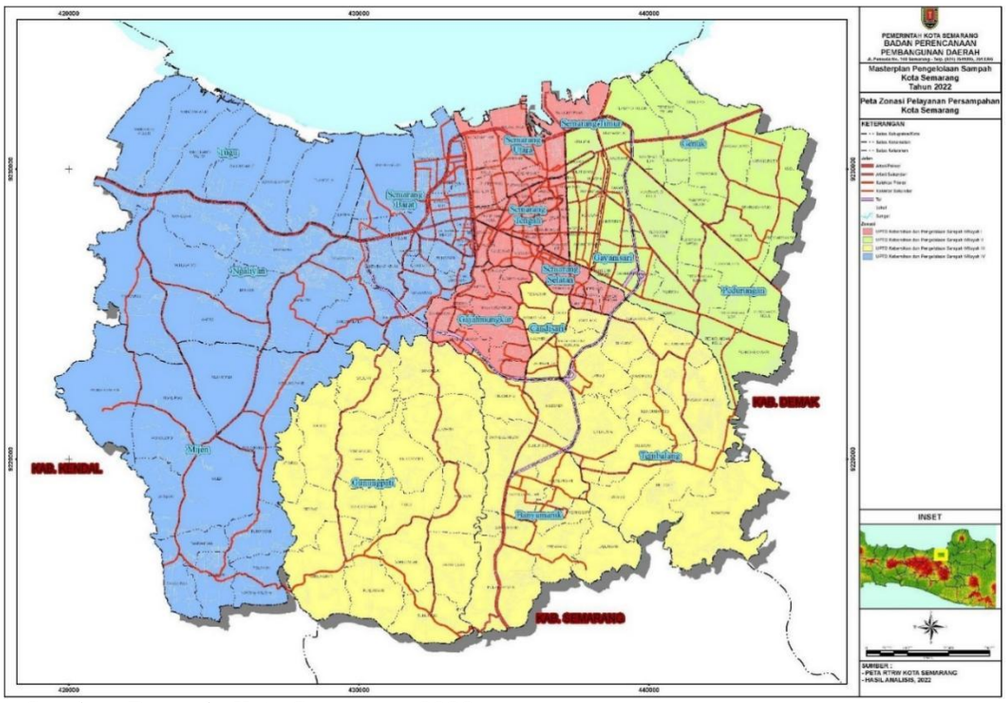

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

10. Rasio Pembuangan Sampah (TPS) per-satuan penduduk

Menurut Peraturan Walikota Semarang No. 34 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa target pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yaitu sebesar 30% dari angka timbulan sedangkan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yaitu sebesar 70% dari angka timbulan. Adapun target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat kota semarang tahun 2018-2025 adalah sebagai berikut

Gambar 2.25 Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Kota Semarang

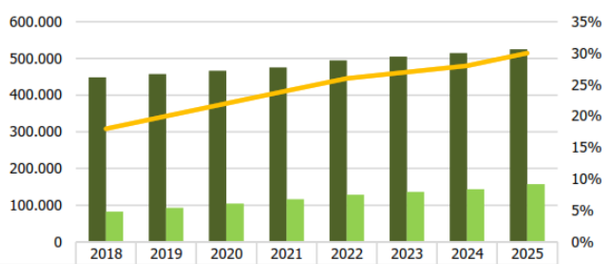

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbulan sampah (ton/tahun)	447.915	456.873	466.010	475.331	494.534	504.426	514.514	524.804
Target pengurangan sampah (ton/tahun)	82.237	93.202	104.573	116.361	128.579	136.195	144.064	157.441
Target pengurangan sampah dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%

Sumber: Lampiran I Peraturan Walikota Semarang No. 34, 2019

11. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Setelah mengetahui timbulan sampah, maka perlu dilakukan pengolahan sampah. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;

a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.
b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Tabel 2. 22 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Tahun	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
2019	8,499
2020	4,644
2021	5,990
2022	14,167
2023	11,00

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

c. Inovasi Perangkat Daerah

1. Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik

Sistem Landfilled merupakan sistem dengan menerapkan pemilahan untuk sampah organik dan anorganik. Sampah organik nantinya dapat dilakukan pengolahan menjadi kompos yang dapat bermanfaat bagi kegiatan pertanian. Sedangkan, sampah anorganik dapat diolah salah satunya menjadi kerajinan tangan yang dapat digunakan lagi. Guna mengurangi gas emisi yang dihasilkan dari timbulan sampah, peningkatan tata kelola, mengimplementasikan sistem pengolahan sampah berkelanjutan serta mitigasi terhadap perubahan iklim maka dilaksanakan proyek pengelolaan sampah energi listrik (PSEL).

Proyek ini dilaksanakan di TPA Jatibarang, sampah yang ada di TPA Jatibarang nantinya akan diubah menjadi tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proyek PSEL Jatibarang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pengoperasional PSEL (pengolahan Sampah Menjadi Listrik) dengan kapasitas 780-1.200 ton/hari dengan menghasilkan listrik kapasitas 15MW.

Gambar 2.26 Hasil Listrik PLTSa tahun 2020

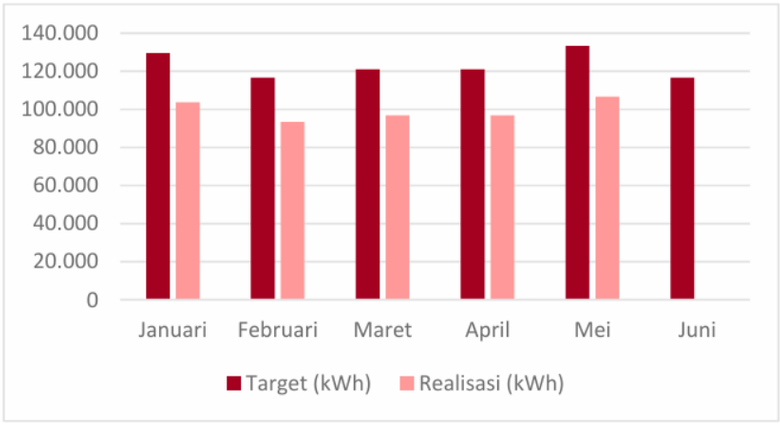

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2022

Gambar 2.27 Proyek Pengelolaan Sampah Energi Listrik di TPA Jatibarang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kondisi spesifik dari Kota Semarang menjadi tantangan di dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup. Dengan luas wilayah yang hanya 373,70 km2, terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 wilayah kelurahan dengan berpenduduk 1.694.740 jiwa/km2 dengan kepadatan penduduk 4.534 jiwa/km2. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi maka potensi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia juga akan semakin besar. Aktivitas masyarakat dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk tetap menjaa kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam menjalankan fungsi-fungsinya, perlu disusun strategi dengan memperhatikan faktor pendorong dan kesempatan serta faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan acaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

a. Tantangan

   Tantangan merupakan situasi/ ancaman bagi organisasi yang datang dari luar dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Kualitas lingkungan hidup belum mencapai kondisi baik dan masih belum memenuhi target (air, udara, tutupan lahan) di Kota Semarang yang saat ini masih dalam kategori cukup
b. Berkurangnya kuantitas dan kualitas tutupan lahan karena perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun
c. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH perlu ditingkatkan. Karena masih terdapat pelaku usaha/ kegiatan yang belum taat
d. Kepedulian organisasi, masyarakat dan pelaku usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
e. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial serta perlunya kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan
f. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
g. Sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih dilakukan oleh warga permukiman yang berada di sempadan sungai
h. Pemahaman masyarakat yang masih belum optimal terhadap pentingnya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah spesifik dari hulu untuk keberlanjutan kualitas lingkungan hidup dimasa datang
i. Perlu adanya pelaksanaan dan evaluasi terhadap perencanaan yang sudah dilakukan
j. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis, menuntut sumber daya agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi yang ada
k. Masih adanya regulasi yang tumpang tindih terkait peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor
l. Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat maupun dunia usaha terhadap lingkungan serta pola pikir lama yang susah untuk diubah khususnya dalam upaya pengelolan, penanganan dan pengurangan sampah
m. Menurunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota.
n. Meningkatnya pertambahan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang semakin padat menyebabkan semakin berkurangnya tutupan vegetasi akan berdampak apabila tiak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang seimbang

b. Peluang

Peluang adalah situasi/ kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi dan memberikan pelauang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, diantaranya

a. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan

b. Adanya peraturan perundang-undangan terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata Kelola Pemerintahan yang baik (good environmental govermance)
d. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat mendukung dalam pengembangan dan penyusunan perencanaan
e. Tersedinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
f. Adanya program-program dan kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka penerapan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan, seperti pembangunan TPS 3R, bank sampah, fasilitas 3R

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang serta peraturan perubahan lain dan Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DLH Kota Semarang di dalam pelaksanaannya.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu: “Nilai kualitas air masih dalam kategori cukup, Masih rendahnya kualitas lahan yang masih dalam kategori kurang, Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan belum optimal, Belum optimalnya pengelolaan sampah dan sistem tata kelola persampahan” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.23
Rumusan Permasalahan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kondisi 16 sungai yang berada di Kota Semarang saat ini berada pada status cukup cemar	1. Semakin tingginya beban cemaran yang masuk ke sungai mengakibatkan semakin tingginya pencemaran air 2. Kualitas air sungai dan anak sungai di 16 sungai yang berada di Kota Semarang saat ini berada pada status cukup cemar 3. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air 4. Beberapa pelaku usaha belum memakai real time pemantauan kualitas air limbahnya 5. Pemantauan hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yang hanya menunjukkan kualitas air sungai sesaat 6. Daya dukung dan daya tampung air masih terlampui
2	Luasan RTH Kota Semarang yang sangat rendah	1. Masih rendahnya upaya mitigasi terhadap perubahan iklim 2. Belum optimalnya fungsi serapan / tangkapan air 3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam 4. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana keanekaragamanhayati 5. Belum adanya perwal terkait pengelolaan keanekaragamanhayati 6. Masih adanya ketimpangan kebijakan
3	Pelaku usaha belum melakukan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Pemahaman para pelaku usaha terhadap kewajiban dan pentingnya melakukan izin PPLH dan PUU LH masih rendah
4	1. Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah masih rendah 2. Sampah yang diubah menjadi kompos masih sedikit jumlahnya 3. Jumlah residu masih terlalu banyak 4. Sampah organik masih sebesar 60%	1. Jumlah bank Sampah saat ini sudah bertambah, namun kemampuan manajemen pengelolaan Bank Sampah yang masih kurang memadai menyebabkan Bank Sampah yang terbangun belum dapat berjalan dengan optimal 2. Pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah belum optimal 3. Belum adanya TPST di Kota Semarang 4. Belum optimalnya IPL Jatibarang 5. Residu masih terlalu banyak yang masuk ke TPA 6. Belum ada teknologi yang mengolah sisa makanan 7. Kurangnya komitmen masyarakat dalam mengatasi sampah 8. Penegakan hukum bagi pelaku pembuang sampah belum dilakukan dengan konsisten 9. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan 10. Kurangnya sarana dan prasarana dari Pemerintah karena belum terlayani semua
5	Regulasi dan SOP persampahan belum ada	1. Regulator (DLH) masih menjadi operator 2. Kelembagaan belum profesional 2. Belum adanya anggaran untuk penyusunan SOP persampahan

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dann Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah alam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun

rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
3. Menurunnya emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dari Sektor Limbah dan Kehutanan
4. Menurunnya laju penyusutan hutan
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju Berkeadilan Sosial, Lestari, Dan Inklusif”. Visi tersebut dijabarkan kedalam tujuh misi, yaitu:

1. Pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian
2. Mewujudkan kesehatan seluruh Masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi
3. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan. Yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak
4. Perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan peningkatkan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital
5. Infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan
6. Kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan sekaligus peningkatan pengendalian banjir dan rob serta dampaknya bagi masyarakat
7. Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih bebas korupsi, berkeadaban dan inklusif berbasis kota cerdas

Misi mendukung dengan urusan bidang lingkungan hidup yaitu pada misi ke 6 yaitu “Kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan sekaligus

peningkatan pengendalian banjir dan rob serta dampaknya bagi masyarakat". Selain visi misi juga ada program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yaitu Semarang Bersih.

Tabel 2.24
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan DLH Kota Semarang Berdasarkan Visi Misi Dan Program 100 Hari Kerja Kepala Daerah Kota Semarang

Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan sekaligus peningkatan pengendalian banjir dan rob serta dampaknya bagi masyarakat 2. Program 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Semarang Bersih	1. Belum terkelolanya limbah rumah tangga dengan baik 2. Badan air di Kota Semarang masih tercemar limbah domestik, industri pertanian maupun peternakan 3. Wewenang pengelolaan RTH saat ini masih tumpang tindih antara beberapa SKPD sehingga tidak ada kepastian penanggung jawab pengelolaan RTH	1. Adanya program kampung proklim yang merupakan program nasional yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim salah satunya penanggulangan dari efek GRK melalui pengendalian banjir, penghijauan, pengelolaan sampah. 2. Masih terdapat lahan-lahan milik pemkot yang terletak di daerah Mijen dan Gunungpati yang fungsi hidrologisnya masih dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai RTH

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

c. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta Renstra DLH Provinsi Jawa Tengah

Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah menetapkan sasaran umum dan sasaran khusus Pembangunan Lingkungan Hidup. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau

Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Tabel 2.25
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja KLHK RI Tahun 2020-2024

IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,56	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	-	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54
3.	Penurunan Laju Deforestas	Juta ha	0,44	0,44	0,43	0,38	0,33	0,31
4.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	50,9	61	63	65	67	70
5.	Luas Lahan dalam DAS Yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	207	90	220	230	230	230
6.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)	Juta ha	28	15,6	13,8	10,3	12,1	18,2

Sumber: Renstra KLHK RI, 2020-2024

Indikator sasaran urusan lingkungan hidup yang ingin dicapai di tingkat Provinsi, apabila dilihat dari Renstra DLH Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 adalah sebagai berikut

1. Menurunnya pencemaran air permukaan
2. Menurunnya pencemaran udara
3. Meningkatnya luas tutupan lahan
4. Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan
5. Meningkatnya kinerja aparatur

Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KLHK Republik Indonesia adalah sebagai berikut

Tabel 2.26
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan DLH Kota Semarang Berdasarkan Sasaran Renstra KLHK Republik Indonesia Dan Renstra DLH Provinsi Jawa Tengah

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Indikator kinerja atas sasaran-sasaran	1. Belum terkelolanya limbah rumah tangga dengan baik	1. Adanya program kampung proklim yang merupakan program

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kementerian Lingkungan Hidup RI meliputi 1. Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 69,74 poin pada tahun 2024 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah sebesar 17,54% pada tahun 2024 3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 70 poin pada tahun 2024.	2. Adanya perubahan kebijakan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Selain itu, untuk pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang berada di kawasan industri kini menjadi kewenangan pengelola industri itu sendiri, untuk yang berketerkaitan dengan pemerintah pusat/ kementerian dari Dinas Lingkungan Hidup ikut serta dalam melakukan pembinaan/pendampingan 3. Wewenang pengelolaan RTH saat ini masih tumpang tindih antara beberapa SKPD sehingga tidak ada kepastian penanggung jawab pengelolaan RTH 4. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga nonpemerintah dalam pengelolaan sampah dapat menghambat upaya peningkatan pengolahan sampah	nasional yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim salah satunya penanggulangan dari efek GRK melalui pengendalian banjir, penghijauan, pengelolaan sampah. 2. Adanya program sekolah adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan

Sumber: Renstra KLHK RI, 2020-2024

d. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya pencemaran air permukaan
2. Menurunnya pencemaran udara
3. Meningkatnya luas tutupan lahan
4. Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan
5. Meningkatnya kinerja aparatur

Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran DLHK Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan DLH Kota Semarang
Berdasarkan Sasaran Renstra DLH Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Indikator sasaran Renstra DLH Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 adalah : 1. Menurunnya pencemaran air permukaan	1. Belum terkelolanya limbah rumah tangga dengan baik 2. Adanya perubahan kebijakan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	1. Adanya program kampung proklim yang merupakan program nasional yang melaksanakan adaptasi

Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2. Menurunnya pencemaran udara 3. Meningkatnya luas tutupan lahan 4. Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan 5. Meningkatnya kinerja aparatur	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Selain itu, untuk pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang berada di kawasan industri kini menjadi kewenangan pengelola industri itu sendiri, untuk yang berketerkaitan dengan pemerintah pusat/ kementerian dari Dinas Lingkungan Hidup ikut serta dalam melakukan pembinaan/pendampingan 3. Wewenang pengelolaan RTH saat ini masih tumpang tindih antara beberapa SKPD sehingga tidak ada kepastian penanggung jawab pengelolaan RTH 4. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga nonpemerintah dalam pengelolaan sampah dapat menghambat upaya peningkatan pengolahan sampah	dan mitigasi perubahan iklim salah satunya penanggulangan dari efek GRK melalui pengendalian banjir, penghijauan, pengelolaan sampah. 2. Adanya program sekolah adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan

Sumber: RENSTRA KLHK RI 2020-2024

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dijabarkan sebagai berikut:

a) Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dan rencana pengembangan sistem jaringan. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan meliputi :

1. Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)

Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK) bisa dilihat pada Gambar 1.1 yang terdiri atas :

a. BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan
BWK I dengan pengembangan berfokus pada perdagangan dan jasa berskala internasional, pusat pemerintah Provinsi, dan pusat pemerintah Kota.

b. BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur
   BWK II dengan pengembangan berfokus pada pusat pendidikan kepolisian dan olahraga.
c. BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara
   BWK III dengan pengembangan berfokus pada transportasi laut, transportasi udara, dan kantor pelayanan Pemerintah Provinsi.
d. BWK IV meliputi Kecamatan Genuk
   BWK IV dengan pengembangan berfokus pada industri
e. BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan
   BWK V dengan pengembangan berfokus pada perdagangan dan jasa, jasa pertemuan dan pameran
f. BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang
   BWK VI dengan pengembangan berfokus pada pendidikan tinggi
g. BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik
   BWK VII dengan pengembangan berfokus pada perkantoran militer dan Perdagangan dan jasa.
h. BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati
   BWK VIII dengan pengembangan berfokus pada pendidikan tinggi dan paru-paru kota
i. BWK IX meliputi Kecamatan Mijen
   BWK IX dengan pengembangan berfokus pada Kantor pelayanan Pemerintahan Kota dan paru-paru kota
j. BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu
   BWK X dengan pengembangan berfokus pada perdagangan dan jasa dan Industri

2. Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

   Rencana penetapan pusat pelayanan tersebut meliputi :

   a. Pusat pelayanan kota

      Pusat pelayanan kota dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, administrasi skala pelayanan Kota dan/atau Regional. Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan administrasi diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.

   b. Sub pusat pelayanan kota

      Sub pusat pelayanan kota dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan BWK. Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di sub pelayanan kota diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.

   c. Pusat lingkungan

      Pusat lingkungan dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala pelayanan lingkungan permukiman. Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di pusat lingkungan diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.

3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat
   Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat tersebut, meliputi :

a. Rencana sistem jaringan jalan
b. Rencana sistem jaringan kereta api
c. Rencana sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan

Peta rencana struktur ruang Kota Semarang bisa dilihat pada Gambar 2.29 dimana peta tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Gambar 2.28 Peta BWK Kota Semarang

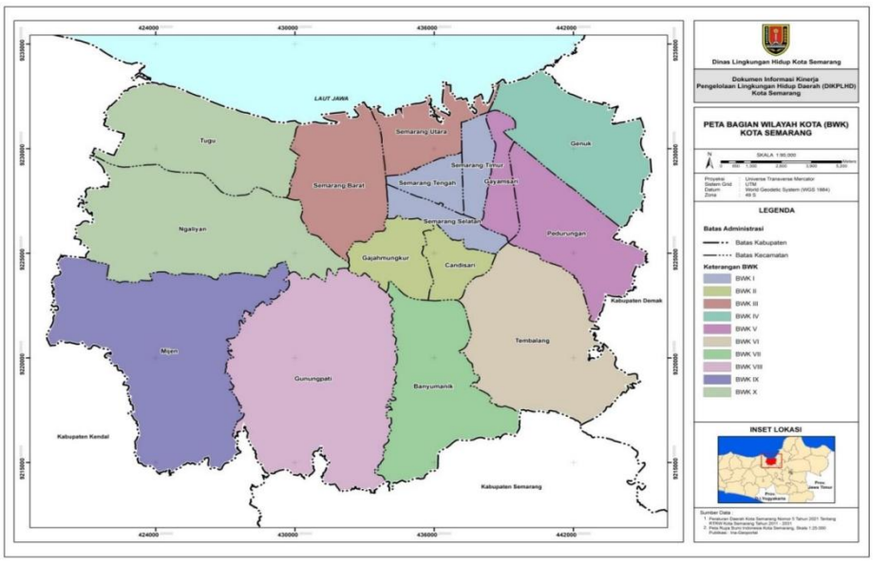

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021

Gambar 2.29 Peta Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

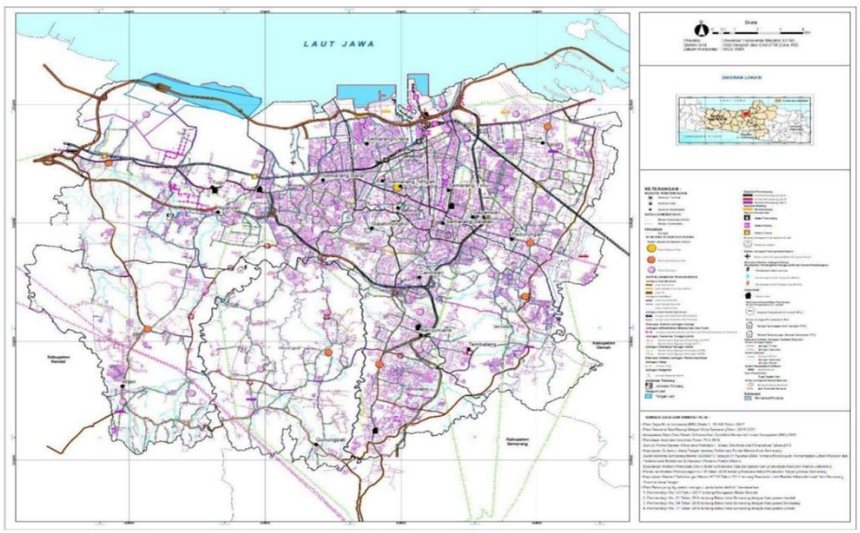

Sumber: Bappeda Kota Semarang,2021

b) Rencana Pola Ruang

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang meliputi kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung, dan kebijakan dan strategipengembangan kawasan budidaya.

1. Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan peruntukan lindung bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Adapun Kawasan Lindung di Kota Semarang meliputi

a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Rencana Kawasan resapan air meliputi: mengembangkan fasilitas tampung air yang mampu menyerapkan air dan melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan.
b) Kawasan perlindungan setempat
   Kawasan ini terdiri atas: sempadan pantai, sempadan sungai, dan Kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan pantai meliputi: sempadan pantai alami di sepanjang pesisir pantai berjarak 100 (seratus) meter dari garis pantai yang ditetapkan dan sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan (break water) ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari garis pantai. Sempadan pantai ditetapkan dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar. Rencana sempadan pantai meliputi: perlindungan garis pantai dan penghijauan sempadan pantai dalam rangka mendukung RTH Kota. Kawasan sekitar danau atau waduk dengan luas 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar berupa kawasan sekitar waduk dan embung.

c) Ruang Terbuka Hijau
   Ruang terbuka hijau kota publik dengan luas kurang lebih 4.405 (empat ribu empat ratus lima) hektar meliputi: Ruang terbuka hijau di daratan, dengan luas kurang lebih 4.156 (empat ribu seratus lima puluh enam) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan dan Ruang terbuka hijau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka hijau dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hektar berada pantai utara Kecamatan Tugu.
d) Kawasan cagar budaya
   Kawasan cagar budaya dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar meliputi
   1) Kota Lama
   2) Cagar budaya lain yang akan ditetapkan peraturan perundangan
      Rencana pengelolaan cagar budaya meliputi pelestarian cagar budaya, revitalisasi cagar budaya, dan pengembangan kepariwisataan.
e) Rencana Kawasan Budidaya
   a. Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 1.991,86 hektar.
   b. Kawasan permukiman
   c. Kawasan Perdagangan dan jasa
   d. Pengembangan kawasan perkantoran meliputi kawasan perkantoran pemerintah dan kawasan perkantoran swasta.
   e. Pengembangan kawasan pendidikan berupa rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan pendidikan unggulan di wilayah Kota.
   f. Pengembangan kawasan olah raga
   g. Rencana kawasan transportasi
   h. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar berada di seluruh wilayah Daerah.
   i. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar berada di seluruh wilayah Daerah.
   j. Rencana kawasan industri

k. Rencana kawasan wisata: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan
l. Kawasan pertahanan dan keamanan
m. Rencana kawasan peruntukan pertanian, antara lain :
   - Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 2.893 hektar meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, dan Tugu.
   - Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 2.100 hektar meliputi Kecamatan Tembalang, Gunungpati, Mijen, dan Ngaliyan.
   - Pengembangan fasilitas peternakan
n. Kawasan peruntukan perikanan: perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan.
o. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tugu.
p. Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) meliputi RTNH lingkungan bangunan, RTNH skala sub-kawasan dan kawasan, RTNH wilayah kota, dan RTNH fungsi tertentu.

Peta rencana pola ruang Kota Semarang bisa dilihat pada Gambar 2.30 dimana peta tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

f) Rencana Kawasan Strategis

1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan ini meliputi :
   a. Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi
   b. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.
2. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan ini meliputi :
   a. Kawasan Waduk Jatibarang
   b. Kawasan Reklamasi pantai
   c. Kawasan Banjir Kanal Barat
   d. Kawasan Banjir Kanal Timur
3. Kawasan Strategis Sosial Budaya Kawasan ini meliputi :
   a. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah
   b. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari
   c. Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunungpati
   d. Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat
   e. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara
   f. Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok
   g. Kawasan perbatasan di Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tugu

Gambar 2.30 Peta Pola Ruang Wilayah Kota Semarang

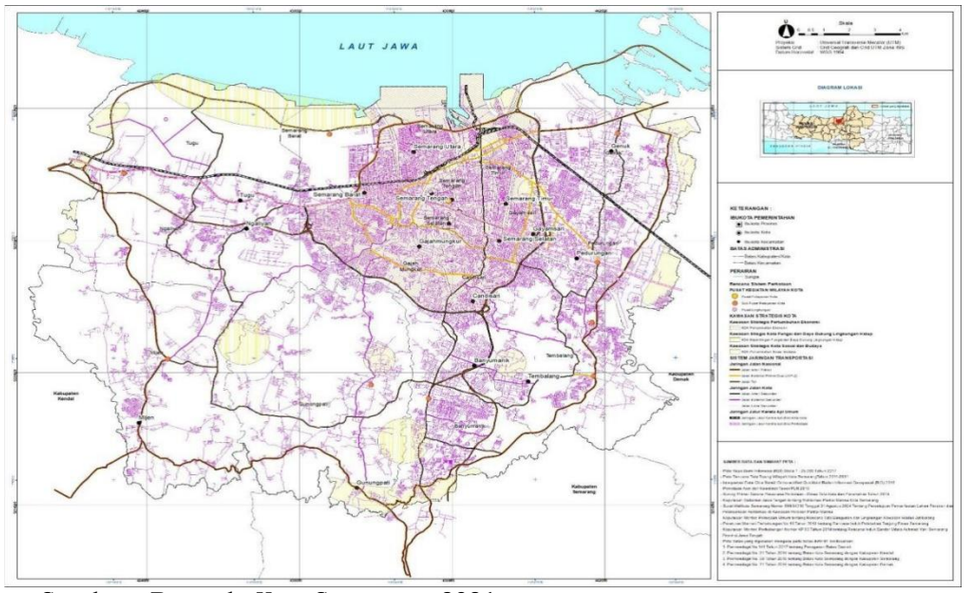

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2021

Gambar 2.31 Peta Kawasan Rencana Strategis Wilayah Kota Semarang

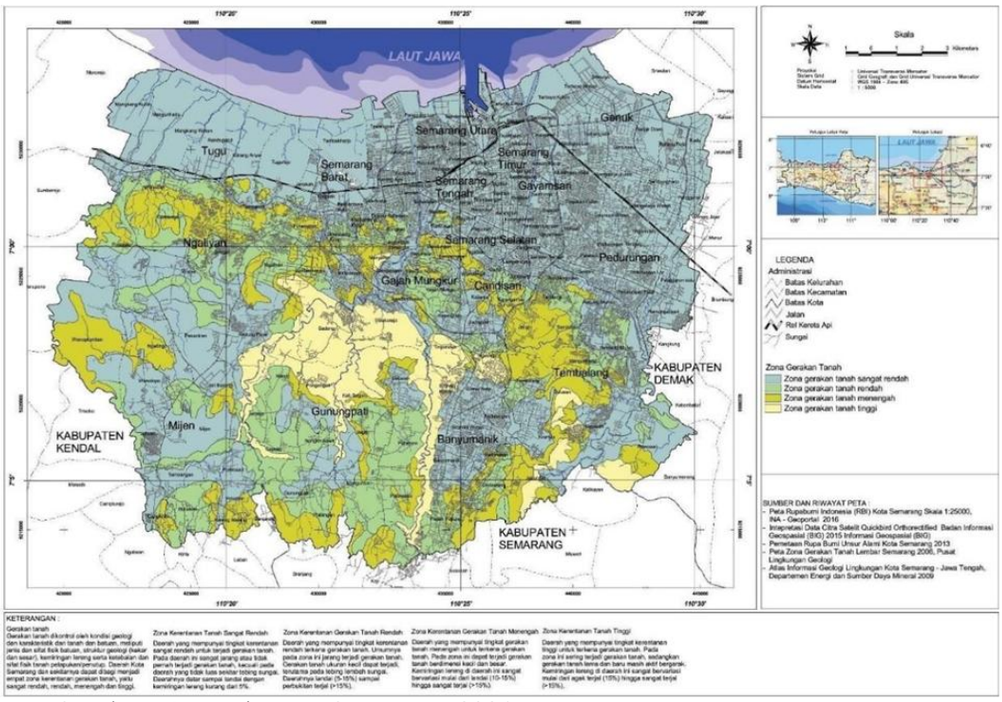

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2021

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Terhadap

dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan. Berdasarkan KLHS, isu yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah :

a. Pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penjelasan mengenai KLHS merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.
b. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup; perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
c. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang antara lain:
    1. Daya Dukung Pangan Kota Semarang dalam kondisi terlampaui karena produksi lebih rendah dari konsumsi
    2. Daya Dukung air dan lahan terbangun dalam kondisi sedang dan hampir menuju kondisi terlampaui
    3. Kualitas daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Semarang bagian utara terutama di DAS Mangkang, DAS Bringin, DAS Semarang dan DAS Banger masuk dalam kategori cemar berat berdasarkan kelas sungai kelas 2
    4. Terdapat kemampuan lahan rendah di wilayah Kecamatan Gunung Pati dan Banyumanik terutama pada wilayah di sepanjang sungai Kaligarang. Selain itu juga adanya potensi rawan banjir dan rob, kawasan rawan gerakan tanah, dan wilayah dengan amblesan tanah
    5. Emisi Gas Rumah Kaca terbesar dari sektor energi transportasi yang berkontribusi lebih dari 90% dari total emisi GRK di Kota Semarang

Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Semarang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan, namun ada beberapa catatan penekanan yang perlu menjadi perhatian Tim penyusun RPJMD, yaitu peran serta pihak terkait merupakan kunci utama dalam keberhasilan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan oleh pemerintah melalui APBD memiliki keterbatasan. Sehingga peran pendanaan, sumber daya dan peran para pihak sangat penting. Peran para pihak yang harus dimaksimalkan adalah perguruan tinggi, pihak swasta dan organisasi masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, pihak swasta dan organisasi masyarakat diharapkan terjadi integrasi dan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang. Dalam melengkapi indikator yang masih belum memiliki data, maka Kota Semarang perlu mempertimbangkan dan memasukan metadata baru terkait indikator TPB yang dikaji. Hal ini dapat dilakukan pada kegiatan Monev SDGs yang secara rutin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyempurnaan rumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, maka penting adanya telaah terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mewujudkan Renstra yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dengan RPJMD Kota Semarang periode 2025-2029. Salah satu poin penting dalam penyusunan KLHS adalah melihat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil identifikasi Indikator TPB terhadap pilar ekonomi sebagai berikut :

Tabel 2.28
Tema Isu KLHS terhadap Dinas Lingkungan Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Perubahan Iklim	1. Daya Dukung Pangan Kota Semarang
	2. Daya Dukung air dan lahan terbangun
	3. Kualitas daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Semarang bagian utara terutama di DAS Mangkang, DAS Bringin, DAS Semarang dan DAS Banger masuk dalam kategori cemar berat berdasarkan kelas sungai kelas 2
	4. Terdapat kemampuan lahan rendah di wilayah Kecamatan GunungPati dan Banyumanik terutama pada wilayah di sepanjang sungai Kaligarang. Selain itu juga adanya potensi rawan banjir dan rob, kawasan rawan gerakan tanah, dan wilayah dengan amblesan tanah
	5. Emisi Gas Rumah Kaca terbesar dari sektor energi transportasi yang berkontribusi lebih dari 90% dari total emisi GRK di Kota Semarang

Sumber : Analisis Penyusun, 2024

Tabel 2.29
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2019-2022
Dinas Lingkungan Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target				Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
			2019	2020	2021	2022			
1	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Indeks	48,75	50,44	50	33,76	Naik	APBD	DLH
2	Bauran energi terbarukan	%	N/A	0,025	2,68	2,68	19,5	APBD	DLH
3	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	78,09	75,11	74,22	72,28	80	APBD	DLH
4	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan	Kota Hijau	18,36	22	24,3	26,18	Ada/ Naik	APBD	DLH

No	Indikator	Satuan	Target				Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
			2019	2020	2021	2022			
	metropolitan								
5	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Ton	17.218.457	19.477.389	35.651.381	130.275.288	Naik	APBD	DLH
6	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	79,08	58,28	77,84	61,06	20	APBD	DLH
7	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	%	56,51	55,9	47,58	33,28	Naik	APBD	DLH
8	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Ha	20	30	40	50	Naik	APBD	DLH

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang 2019-2022

i. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Renstra Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 2.30
Isu Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang menjadi kewenangan DISPERKIM • Pemanfaatan Online Monitoring System (Onlimo) untuk pemantauan pemasangan alat pantau real time yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik • Memperketat pengawasan, terhadap pembuangan air limbah dari kegiatan usaha atau industri yang memengaruhi langsung terhadap kualitas air • Penggunaan kendaraan berbahan bakar BBG untuk transportasi umum Trans Semarang • Pemantauan kualitas udara menggunakan metode Air Quality Monitoring System (AQMS) yang	• Kondisi 16 sungai yang berada di Kota Semarang saat ini berada pada status cukup cemar • Luasan RTH Kota Semarang yang sangat rendah • Pelaku usaha belum melakukan izin lingkungan, izin PPLH dan • PUU LH • Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah masih rendah • Sampah yang diubah menjadi kompos masih sedikit jumlahnya • Jumlah residu masih terlalu banyak • Sampah organik masih sebesar 60% • Regulasi dan SOP persampahan belum ada	• Daya Dukung Pangan Kota Semarang • Daya Dukung air dan lahan terbangu • Kualitas daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Semarang bagian utara terutama di DAS Mangkang, DAS Bringin, DAS Semarang dan DAS Banger masuk dalam kategori cemar berat berdasarkan kela sungai kelas 2 • Terdapat kemampuan lahan rendah di wilayah Kecamatan GunungPat dan Banyumanik terutama pada wilayah di sepanjang sungai Kaligarang. Selain itu juga adanya potensi rawan banjir dan rob, kawasan rawan gerakan tanah, dan wilayah dengan amblesan tanah • Emisi Gas Rumah Kaca terbesar dari sektor energi transportasi yan berkontribusi lebih dari 90% dari total emisi GRK di Kota Semarang	**Megatren :** • Masih kurangnya pengembangan infrastruktur hijau dan ruang terbuka hijau untuk mengantisipasi perubahan iklim • Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan	**Draft RPJPN 2025-2045** • Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan • Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah • Masih rendahnya penggunaan energi terbarukan • Masih rendahnya efisiensi energi • Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau • Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan • Permasalahan lingkungan	**Ranwal RPJPD** • Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah • Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana • Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana • Tantangan perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung **KLHS RPJMD** • Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah sebesar 74.672,90 Gg CO2e dengan rincian dari sektor energi 73,24%, AFOLU 20,27%, IPPU Industri 4,46%, dan Limbah 2%. • Keberlanjutan pembangunan dengan	1. Kualitas air permukaan 2. Pengembangan/penemuan Energi Terbarukan 3. Peningkatan tutupan hutan dan ruang terbuka hijau 4. Keanekaragaman Hayati 5. Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir 6. Perubahan iklim 7. Kualitas udara 8. Konservasi wilayah pesisir 9. Daya dukung fungsi lindung

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
dilaksanakan antara KLHK dengan DLH • Masih terdapat lahan-lahan milik pemkot yang terletak di daerah Mijen dan Gunungpati yang fungsi hidrologisnya masih dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai RTH				utamanya meliputi banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Pulau Jawa serta pencemaran udara dan air. • Pulau Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam • Permasalahan perkotaan seperti banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh **KLHS RPJPN 2025-2045** Isu pemanfataan sumber daya alam : • Kelangkaan/krisis permukaan air dan air tanah • Kerawanan pangan • Deforestasi dan degradasi hutan • Berkurangnya dan hilangnya cadangan sumber daya alam • Kerusakan ekosistem dan habitat • Kepunahan spesies • Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang	daya dukung lingkungan dan SDA • Rendahnya jasa lingkungan penyedia air bersih di beberapa kabupaten/kota • Rendahnya kondisi jasa lingkungan penyedia pangan di beberapa kabupaten/kota • Rendahnya jasa lingkungan pemurnian air di beberapa kabupaten/kota • Rendahnya kondisi jasa lingkungan pengatur pencegahan bencana dan pelindungan bencana di beberapa kabupaten/kota • Krisis air di beberapa wilayah Jawa Tengah perlu ada upaya prioritas dalam pengelolaan sumber daya air terutama perlindungan mata air • Rendahnya jasa lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara di beberapa Kabupaten/Kota • Adanya daerah rawan di Provinsi Jawa Tengah meliputi: bencana terhadap banjir, tsunami, gerakan	

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan • Degradasi kawasan konservasi • Kerusakan ekosistem dan berkurangnya populasi keanekaragaman hayati di laut	tanah, gunungapi, kekeringan, dan bencana tektonik • Perlunya memperhatikan zona kerentanan gerakan tanah sebagai dasar pengembangan wilayah	

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Keterangan:

1	Potensi kelebihan dari daerah
2	Permasalahan perangkat daerah yang terdapat di tabel 2.7
3	Isu KLHS yang terdapat di tabel 2.8
4	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang bersifat global yang relevan dengan urusan
5	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang level nasional yang relevan dengan urusan
6	Isu yang terdapat dokumen RPJMD Provinsi/Kab/Kota yang relevan dengan urusan
7	Hasil analisis isu strategis urusan

2.2.4 Pengarustamaan gender

Gender bukanlah sekedar istilah jenis kelamin yang mengkaitkan dengan laki-laki atau perempuan semata, namun gender adalah persepsi masyarakat yang secara sosial dibangun dan mengacu pada peran, perilaku dan identitas seseorang. Gender merupakan konsep yang mengacu kepada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial dan budaya yang dapat berubah dari waktu ke waktu, karenanya sangat jelas bahwa gender dan jenis kelamin adalah istilah yang berbeda, seks/jenis kelamin bersifat mutlak sementara gender cenderung tidak.

Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan. Pengarustamaan gender merupakan proses yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek pembangunan termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta program, untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan manfaat dari pembangunan sehingga tercapainya masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Isu gender merupakan permasalahan yang muncul akibat ketimpangan peran, fungsi, tanggungjawab dan hak antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial. Isu gender mencakup berbagai ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat bias gender.

Bentuk pelaksanaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sendiri dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan dan berbagai bentuk seperti sosialisasi, pembinaan, pendampingan yang berbasis responsif gender (keterlibatan perempuan dan laki-laki) untuk mengintegrasikan gender ke dalam siklus proses pembangunan. Komitmen dan keseriusan dari pimpinan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengarustamaangender. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender yang mengamanahkan bahwa pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam segala bidang pembangunan dilakukan oleh seluruh *stakeholder* baik perangkat daerah, badan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan dengan memasukkan unsur perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan maupun pengambilan keputusan. Kemudian untuk menjadi dasar pelaksanaan bagi OPD dikelurkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender di Kota Semarang. Peraturan Walikota tersebut, ditindaklanjuti dengan penyusunan Surat Keputusan Walikota Semarang

Nomor 275.521/1135 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh OPD Pemerintah Kota Semarang. Dalam rangka penguatan pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, telah dibentuk Focal Point pada OPD yang dilegalkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 2640/400.2.2/XII/2024tentang Pembentukan Focal Poin Pengarustamaan Gender (FP-PUG) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang guna mendorong terwujudnya pengembangan kegiatan yang responsif gender di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Berikut program dan kegiatan beresponsif gender dengan sasaran dan output dari kegiatan serta penjelasan nya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Output	Sasaran	Penjelasan Responsif Gender
			Kode Rek	Nomenklatur			
1.	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pelaksanaan program kampung iklim	16 Kecamatan	Ada GAP/GBS
2.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	2.11.06.2.01.0001	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan	Tidak ada GAP/GBS
3.	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Pelaksanaan kegiatan Hari Lingkungan Hidup, pelaksanaan Kalpataru,	Kelurahan 16 Kecamatan	Tidak ada GAP/GBS
			2.11.08.2.01.0005	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Sosialisasi monitoring dan evaluasi	Kelurahan 16 Kecamatan	Ada GAP/GBS
					Pendampingan dan pembinaan kelompok bank sampah di 16 kecamatan		

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Output	Sasaran	Penjelasan Responsif Gender
			Kode Rek	Nomenklatur			
					Pelaksanaan kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)		
4.	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan kegiatan sekolah Adiwiyata	Sekolah se kota Semarang	Tidak ada GAP/GBS
5.	Pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Penguatan KSM atau kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kelurahan 16 Kecamatan	Ada GAP/GBS

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang urusan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2025-2029 adalah “Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah” dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”. Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kebersihan Kota, dengan indikator sasaran “Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah”
2. Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator sasaran
    a. Indeks Kualitas Air
    b. Indeks Kualitas Udara
    c. Indeks Kualitas Lahan
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, dengan indikator sasaran “Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup”

Adapun tujuan dan sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	64,89	64,94	64,98	65,03	65,07	65,11	
		Meningkatnya Kebersihan Kota	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,17	17,96	21,76	25,55	29,34	33,13	
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	indeks	57,71	57,81	57,91	58,01	58,11	58,21	
			Indeks Kualitas Udara	indeks	82,63	82,64	82,65	82,66	82,67	82,68	
			Indeks Kualitas Lahan	indeks	44,43	44,44	44,45	44,46	44,47	44,48	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	Angka	77,25	77,35	77,45	77,55	77,65	77,75	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Lingkungan Hidup	Angka	89,00	90,25	90,50	90,70	91,00	91,25	

Keterangan:

19	Sasaran dalam dokumen RPJMD yang dapat didukung oleh PD terkait
20	Tujuan PD minimal 1 kalimat tujuan
21	Sasaran Perangkat Daerah
22	Indikator tujuan maupun sasaran
23	Satuan dari indikator
24	Target indikator
25	Target indikator
26	Target indikator
27	Target indikator
28	Target indikator
29	Target indikator
30	Dapat diisi definisi operasional atau rumus indikator

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Peningkatan dan penguatan kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penambahan sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan	Pengembang ankawasan konservasi melalui pembanguna n kebun raya/ kebun /taman hutan raya	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang untuk mengolah sampah menjadi energi listrik atau refused derived fuel (RDF)

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat	Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular dan teknologi ramah lingkungan	Mengembangkan potensi dan kemitraan pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan
			Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	
			Meningkatkan operasional pengelolaan sampah	
			Mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang didukung kearifan lokal	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			Mengembangkan sistem pencegahan pencemaran B3 dan limbah B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu untuk mengurangi dampak perubahan iklim	Meningkatkan kualitas dalam penyusunan dan perumusan instrumen penataan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan keterpaduan data SLHD serta mendorong pemanfaatan SLHD sebagai salah satu rujukan dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup daerah	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan keterpaduan data SLHD serta mendorong pemanfaatan SLHD sebagai salah satu rujukan dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup daerah	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Menerapkan sistem pengolahan limbah yang efektif, pengendalian pencemaran udara, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan	
			Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk pencegahan pencamaran/kerusakan lingkungan	
			Meningkatkan penguatan pengelolaan kawasan konservasi	
			Meningkatkan penyebaran informasi lingkungan melalui pengembangan teknologi informasi yang mendukung aksesibilitas informasi	
			Meningkatkan kualitas pengawasan lingkungan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Meningkatnya kemudahan perijinan lingkungan	
			Meningkatkan program konservasi keanekaragamanhayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Meningkatkan operasional pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan
			Membangun potensi dan kemitraan pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan berbagai pihak	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah	
			Meningkatkan sarana dan prasarana TPA/TPST/SPA yang ramah lingkungan dan sesuai standar teknis	
			Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengangkutan	
			sampah	
			Mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang didukung kearifan lokal	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			Meningkatkan infrastruktur pencegahan pencemaran B3 dan limbah B3 serta meningkatkan koordinasi berbagai pihak untuk pengelolaan limbah B3 yang lebih baik	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penanganan pengaduan lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian DLH	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah				Indeks Kualitas lingkungan Hidup		
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Air		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP (Kebijakan Rencana dan Program)		Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ka. Bidang Penataan Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan
				Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan
				RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan
				Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan
					Persentase KLHS sesuai tahapan penyusunan	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan
				Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan
			Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berbasis data dan informasi yang valid		Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ka. Bidang Penataan Lingungan Hidup
				Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan
				Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Sub Koord. Instrumen Penataan Lingkungan
					Indeks Kualitas Udara		
			Menurunnya pencemaran udara		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Persampahan	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran	Ka. UPTD Laboratorium

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan
				Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Ka. TU UPTD Laboratorium Lingkungan
				Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair
				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair
			Menurunnya pencemaran udara		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi LH
				Meningkatnya upaya penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase terlaksananya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim
			Menurunnya kerusakan lahan		Luasan areal yang terkonservasi	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim
				Meningkatnya luasan tutupan lahan	Cakupan luasan penghijauan	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
				Kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
			Meningkatnya cakupan informasi lingkungan hidup		Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sekdin
				Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun kabupaten/kota terhadap target yang telah ditetapkan	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Masyarakat di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		
				Meningkatnya ketersediaan informasi masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan informasi publik bidang lingkungan hidup	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	2.11.03.2.02.0004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi
			Meningkatnya kinerja pengawasan lingkungan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan		Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan	2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ka. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
				Meningkatnya ketaatan penanganan jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2.11.06 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengawasan Lingkungan
				Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan	Sub Koord Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kabupaten/Kota yang diawasi		Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ka. Bidang Penataan Lingkungan Hidup
				Meningkatnya fasilitasi izin lingkungan dan /atau izin PPLH	Persentase ijin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub. Koord. Pengkajian Dampak Lingkungan
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Sub. Koord. Pengkajian Dampak Lingkungan
					Indeks Kualitas Lahan		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan
				Meningkatnya kualitas sarana prasarana keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
				Rencana Induk Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Induk	2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan	Sub Koordinator Konservasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Pengelolaan Kehati yang Disusun	Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman Hayati
				Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
				Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
		Meningkatnya kebersihan kota			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Persentase pengelolaan sampah	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Ka. Bidang Pengelolaan Sampah
				Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Sub Koord. Operasional Pengelolaan Sampah
				Terlaksananya kegiatan pengurangan sama melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur	2.11.11.2.01.0030 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Sub Koord. Operasional Pengelolaan Sampah
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Sub Koord. Operasional Pengelolaan Sampah
				Terwujudnya pengembangan potensi dan kemitraan pengelolaan sampah yang aktif dan terintegrasi	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Sub Koord. Pengembangan Potensi dan Kemitraan
				Meningkatnya Pemahaman,	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta	Sub Koord. Pengembangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Potensi dan Kemitraan
				Meningkatnya kapasitas dan tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Sub Koord. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Sub Koord. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah
				Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan Saran Penanganan Sampah	Sub Koord. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
				Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01.0015 Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Sub Koord. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
				Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan sampah di TPA/TPST/SPA	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Ka. UPTD TPA

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ka. TU UPTD TPA
				Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Sub Koord. Operasional Pengelolaan Sampah
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sub Koord. Operasional Pengelolaan Sampah
				Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah di Kec. Semarang Tengah, Kec. Semarang Utara, Kec. Gajah Mungkur dan Kec. Semarang Selatan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Ka. UPTD I
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Ka. TU UPTD I
				Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah di Kec. Gayamsari, Kec. Semarang Timur, Kec. Genuk dan Kec. Pedurungan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Ka. UPTD II
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Ka. TU UPTD II
				Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah di Kec. Candisari, Kec. Tembalang, Kec.	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Ka. UPTD III

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Banyumanik dan Kec. Gunungpati			
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Ka. TU UPTD III
				Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah di Kec. Tugu, Kec. Semarang Barat, Kec. Mijen, Kec. Ngaliyan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Ka. UPTD IV
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Ka. TU UPTD IV
				Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Sub Koord. Pengembangan Potensi dan Kemitraan
				Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama/kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	2.11.11.2.01.0023 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Sub Koord. Pengembangan Potensi dan Kemitraan
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Ka. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
				Meningkatnya penghargaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase terlaksananya penghargaan lingkungan yang di selenggarakan	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Ka. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
				Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terselenggara	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidu	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
				Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan		Persentase limbah B3 yang terkelola	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	Ka. Bidang Penataan Lingkungan Hidup

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)			(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
				Meningkatnya fasilitasi penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	Persentase persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Sub. Koord. Pencegahan da Pencemaran B3 dan Limbah B3
				Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem pelayanan Perizinaan Berusaha Terintegrasi Secara Elketronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01.0005 Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem pelayanan Perizinaan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Sub. Koord. Pencegahan da Pencemaran B3 dan Limbah B3
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	2.11.05.2.01.0006 Pembinaan dan Pemantauanpelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Sub. Koord. Pencegahan da Pencemaran B3 dan Limbah B3
				Meningkatnya fasilitasi pengumpulan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang terkumpul	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Sub. Koord. Pencegahan da Pencemaran B3 dan Limbah B3

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Sub. Koord. Pencegahan da Pencemaran B3 dan Limbah B3
					Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		
					Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 dikabupaten/kota yang tersedia	2.11.05.2.02.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Sub. Koord. Pencegahan da Pencemaran B3 dan Limbah B3
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup	2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Ka. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
				Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang selesai di tangani	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Sub Koord. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
				Diselesaikannya Sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan	2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang	Sub Koord. Pengaduan dan Penyelesaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan ke wenangan kabupaten/kota	kabupaten/kota	ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Sengketa Lingkungan
				Pengelolaan pengaduan permasalahan Pen-cemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang dikelola	Jumlah Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Yang ditindaklanjuti /dikelola	2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RKA DLH dan Laporan Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup dan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas	2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup	Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup	
				Tersedianya Dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Penyusunan Dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA Dinas Lingkungan Hidup	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Dinas Lingkungan Hidup	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Koord. Perencanaan dan Evaluasi
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ka. Subag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ka. Subag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ka. Subag Keuangan dan BMD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun DLH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DLH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun DLH	Ka. Subag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran DLH	Ka. Subag Keuangan dan BMD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ka. Subag Keuangan dan BMD
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup	Nilai layanan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ka. Subag Umum dan kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ka. Subag Umum dan kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ka. Subag Umum dan kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian dan BMD
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ka. Subag Keuangan dan BMD
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Lingkungan Hidup	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada DLH	Berbasis Elektronik pada DLH	
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk men-dukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup yang selesai ditindaklanjuti	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Penguatan Sistem Pangan Kota yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang untuk mengolah sampah menjadi energi listrik atau refused derived fuel (RDF)	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Bidang Pengelolaan Sampah
			2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ka. UPT TPA
2.	Penguatan manajemen pengangkutan sampah	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Bidang Pengelolaan Sampah
			2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sub Koord. Operasional Pengelolaan Sampah. Ka. UPTD 1-4
			2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	Ka. UPTD TPA
3.	Penambahan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Bidang Pengelolaan Sampah
			2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Sub Koord. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah
			2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Sub Koord. Operasional Pengelolaan Sampah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ka. UPTD TPA
4.	Peningkatan kawasan mandiri pengelolaan sampah	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Bidang Pengelolaan Sampah
			2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Sub Koord. Pengembangan Potensi dan Kemitraan
5.	Pengembangan Taman/Kebun/Taman Hutan Raya	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan
			2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
			2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
6.	Peningkatan upaya penghijauan wilayah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.2.01 Pengelolaan KeanekaragamanHayati Kabupaten/Kota	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan
			2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
7.	Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan	Menurunnya kerusakan lahan	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
			2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
		Menurunnya pencemaran udara	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim
			2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim
		Meningkatnya cakupan informasi lingkungan hidup	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
			2.11.03.2.02.0004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
8.	Gerakan Semarang Menanam	Menurunnya kerusakan lahan	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
			2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati
9.	Gerakan Semarang Bersih	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Bidang Pengelolaan Sampah
			2.11.11.2.01.0030 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Sub Koord. Operasional Pengelolaan Sampah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
			2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
			2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
10.	Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
			2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
11.	Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
12.	Peningkatan Gerakan Semarang Wegah Nyampah	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
			2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
			2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
13.	Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST)	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
		Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Bidang Pengelolaan Sampah
			2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Sub Koord. Operasional Pengelolaan Sampah
			2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Sub Koord. Pengembangan Potensi dan Kemitraan
		Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3
			2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Sub Koord. Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			2.11.05.2.02.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3
14.	Kolaborasi Antar Warga (Sekolah/Pramuka/Karang Taruna/Komunitas Peduli Lingkungan)	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
			2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
			2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
			2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Sub Koord. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan

Program-program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yang diuraikan melalui outcome Dinas Lingkungan Hidup dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang untuk mengolah sampah menjadi energi listrik atau refused derived fuel (RDF)

   Pelaksanaan program prioritas tersebut diutamakan untuk pembenahan/penataan TPA Jatibarang menuju Sanitary Landfill. Pelaksanaannya dijabarkan melalui beberapa uraian aktivitas sebagai berikut.
   a. Peningkatan IPL TPA Jatibarang dan saluran limbah untuk menangani leacheate yang mencemari sungai
   b. Pembangunan akses jalan TPA
   c. Pembangunan perkuatan talud TPA
   d. Pembangunan hidran kawasan di TPA untuk memitigasi bencana kebakaran
   e. Pembangunan menara pengawas keamanan dan bahaya kebakaran
   f. Pengadaan terpal penutup zona buang
   g. Penyusunan Kajian Evaluasi Sanitary Landfill
   h. Operasional Tim Pencegahan Bencana di TPA Jatibarang
   i. Pembangunan sumur pantau di TPA Jatibarang
   j. Pembangunan Instalasi Gas Methan
   k. Recruitment tenaga security TPA Jatibarang
   l. Pemeliharaan lampu PJU TPA Jatibarang
   m. PSEL
2. Penguatan manajemen pengangkutan sampah

   Pelaksanaan program prioritas tersebut diarahkan untuk memaksimalkan layanan pengangkutan sampah ke TPA Jatibarang, yang dijabarkan melalui uraian aktivitas sebagai berikut:
   a. Pengadaan armada dump truck
   b. Pengadaan armada truk armroll
   c. Pengadaan kontainer
   d. Pengadaan compactor
   e. Operasional dan Pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah
   f. Pemeliharaan dan peremajaan kontainer
3. Penambahan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah

   Untuk meningkatkan layanan persampahan di Kota Semarang maka perlu penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dijabarkan melalui beberapa uraian aktivitas sebagai berikut:
   a. Pengadaan alat berat (Excavator, Bulldozer, Wheelloader)
   b. Pembangunan dan pemeliharaan TPS
   c. Penyusunan FS dan DED TPST
   d. Pengelolaan sampah spesifik B3 di FPSS
   e. Pengadaan tong sampah
4. Peningkatan kawasan mandiri pengelolaan sampah

   Yang termasuk dalam kawasan mandiri yaitu kawasan perumahan, permukiman/perkampungan, kawasan industri, kawasan pendidikan

serta kawasan komersial. Kawasan-kawasan tersebut diharapkan bisa mengelola timbulan sampah yang di hasilkan secara mandiri oleh pengelola kawasan. Sampah yang diolah meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Program prioritas ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan tenis pengelolaan lingkungan hidup khususnya bagi kawasan mandiri.

5. Pengembangan Taman/Kebun/Taman Hutan Raya

   Pelaksanaan program prioritas tersebut sebagai upaya dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Beberapa uraian aktivitasnya yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap adalah sebagai berikut:
   a. Penyusunan Amdal Kebun Raya Tinjomoyo
   b. Pembangunan Sarana dan Utilitas Kebun Raya Tinjomoyo
   c. Penambahan koleksi tumbuhan

6. Peningkatan upaya penghijauan wilayah

   Peningkatan upaya penghijauan wilayah ini merujuk pada berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar lebih hijau dan memberikan manfaat optimal bagi lingkungan. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam peningkatan upaya penghijauan wilayah:
   a. Penambahan Taman Kehati
   b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati
   c. Penanaman tematik dengan mengangkat kearifan lokal suatu wilayah
   d. Penghijauan di wilayah Pesisir/DAS/Perkotaan

7. Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan

   Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lahan secara signifikan dengan memperbaiki kondisi tanah agar lebih baik, serta mampu mendukung fungsi ekologisnya secara optimal, antara lain:
   a. Penyusunan kajian inventarisasi pemetaan lahan kritis
   b. Penghijauan di lahan kritis dan rawan longsor
   c. Konservasi kawasan perlindungan sumber mata air
   d. Pengendalian polusi
   e. Penyusunan dokumen lingkungan hidup (DIKPLHD/SLHD, IKLH, Inventarisasi Gas Rumah Kaca)
   f. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

8. Gerakan Semarang Menanam

   Gerakan Semarang Menanam merupakan inisiatif Pemerintah Kota Semarang untuk mengajak masyarakat menanam pohon dan melakukan urban farming. Gerakan ini bertujuan selain menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sejuk dan sehat, serta meningkatkan ketahanan pangan. Pelaksanaan program prioritas tersebut, antara lain dengan:
   a. Pengadaan bibit tanaman
   b. Penanaman bibit tanaman dan mangrove

9. Gerakan Semarang Bersih

   Gerakan Semarang Bersih bertujuan untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai kota yang bersih dan berkelanjutan dengan pengelolaan sampah yang lebih baik. Berbagai upaya dilakukan termasuk program zero waste

berbasis masyarakat, gerakan pilah sampah dari rumah dan optimalisasi bank sampah. Untuk melaksanakan program prioritas tersebut perlu peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai:

a. Pengadaan Kendaraan Roda 3 untuk TPS3R dan Bank Sampah
b. Pengadaan Gerobak sampah
c. Pengadaan tong sampah tunggal, unit set 2 dan unit set 3
d. Tim Yustisi Lingkungan Hidup

10. Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan aturan terkait pengendalian penggunaan plastik sekali pakai, yaitu Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2019. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang dihasilkan dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang melakukan beberapa upaya untuk program prioritas ini, antara lain:

a. Melakukan sosialisasi kebijakan ke masyarakat
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perwal 27 Tahun 2019 ini melalui pengawasan lapangan.
c. Penukaran botol plastik dengan tanaman

11. Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah

Gerakan ini bertujuan mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dengan memilah sampah dari rumah maka akan mengurangi beban TPA, memudahkan pengelolaan sampah, meningkatkan nilai ekonomis dan menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Untuk melaksanakan program prioritas ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melakukan beberapa upaya antara lain:

a. Penyelenggaraan Hari Peduli Sampah Nasional
b. Pengadaan Tas Pilah Sampah untuk masyarakat
c. FGD/Sosialisasi pengelolaan sampah tingkat rumah tangga ke 16 kecamatan

12. Peningkatan Gerakan Semarang Wegah Nyampah

Gerakan Wegah Nyampah untuk menyosialisasikan kebijakan pengendalian plastik dan isu persampahan secara umum akan dilaksanakan melalui penyebarluasan informasi melalui media online dan cetak.

13. Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST)

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, pengelolaan sampah dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengelola sampah dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Peran serta aktif dari masyarakat sangat diharapkan dalam program pemberdayaan ini. Untuk melaksanakan program prioritas pemberdayaan masyarakat, dapat dijabarkan dalam beberapa aktivitas sebagai berikut:

a. Penyediaan prasarana pendukung kegiatan Bank Sampah (kendaraan roda 3, mesin pencacah, alat timbangan)

b. Bimbingan teknis dan pendampingan ke Bank Sampah
c. Lomba Bank Sampah
d. Lomba Inovasi Pengolahan Sampah
e. Pemeliharaan bank sampah
f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kegiatan sosialisasi
g. Pembangunan TPS3R
h. Penyediaan sarana prasarana Bank Sampah Induk
i. Pembangunan sumur kompos di kelurahan
j. Pelatihan pembuatan biowash pada 16 kecamatan
k. Pembentukan dan pembinaan BSI Kecamatan dan Bank Sampah Unit
l. Penyusunan revisi Perwal Retribusi

14. Kolaborasi Antar Warga (Sekolah/Pramuka/Karang Taruna/Komunitas Peduli Lingkungan)

Kolaborasi antar warga sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Kolaborasi ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, memperkuat gerakan pelestarian lingkungan, membangun kebersamaan dan mengoptimalkan sumber daya. Dukungan pemerintah, swasta maupun lembaga pendidikan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan pelestarian lingkungan. Program prioritas kolaborasi antar warga dilaksanakan dengan beberapa aktivitas sebagai berikut:

a. Saka Kalpataru
b. Pendampingan dan Monitoring Sekolah Adiwiyata
c. Sosialisasi dan pendampingan program kampung iklim (Proklim) di 177 Kelurahan
d. Penanaman penghijauan bersama masyarakat/komunitas/ mahasiswa/pelajar
e. Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup
f. Pengadaan Automatic Weather System (AWS)
g. Pemanenan Air Hujan (PAH) Hybrid
h. Pembuatan Sumur Resapan
i. Pembuatan Biopori
j. Pengadaan Alat Bor Biopori
k. Pemasangan Onlimo (konservasi sumber daya air)
l. Sosialisasi penertiban persetujuan lingkungan pelaku usaha
m. Pembangunan IPAL
n. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**141.777.987.762**		**157.128.188.592**		**163.809.310.496**		**165.036.537.653**		**167.931.312.365**
2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					**141.777.987.762**		**157.128.188.592**		**163.809.310.496**		**165.036.537.653**		**167.931.312.365**
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					**1.260.000.000**		**1.404.500.000**		**1.424.025.000**		**1.284.819.658**		**1.664.630.576**
	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota					**530.000.000**		**762.750.000**		**795.137.500**		**910.432.285**		**824.833.094**
	Persentase terlaksananya penguatan , Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota													
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	280.000.000	2	367.750.000	2	381.137.500	2	300.194.785	2	310.807.094
2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen	1	1	250.000.000	3	395.000.000	3	414.000.000	4	610.237.500	4	514.026.000
2.11.02.2.02. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					**730.000.000**		**641.750.000**		**628.887.500**		**374.387.373**		**839.797.482**
	Persentase Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	472.254.324
2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS													
	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	dokumen	1	1	280.000.000	1	241.750.000	1	298.887.500	1	185.387.373	1	164.093.158
2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	4	2	450.000.000	2	400.000.000	1	330.000.000	1	189.000.000	1	203.450.000
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					**4.611.046.434**		**5.098.874.974**		**5.311.200.661**		**5.350.201.873**		**5.442.197.655**
	Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara	%	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Persampahan	ton CO2eq	114.017,03	38.810,30		63.941,43		103.083,25		150.310,49		206.118,21	
	Luasan areal yang terkonservasi	Ha	21,23	22,23		22,73		23,23		23,73		24,23	
	Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					**3.700.756.367**		**4.131.584.907**		**4.333.084.907**		**4.370.586.119**		**4.448.586.119**
	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	persen	100	100		100		100		100		100	
	Persentase terlaksananya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	persen	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	persen	100	100		100		100		100		100	
	Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	persen	90	90		91		92		93		94	
2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	dokumen	9	5	1.011.918.573	5	1.245.918.573	4	1.341.418.573	4	1.351.919.785	4	1.391.919.785
2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	dokumen	13	15	1.700.152.247	13	1.796.980.787	14	1.896.980.787	13	1.923.980.787	14	1.951.980.787
2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah													
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	dokumen	12	12	888.685.547	12	988.685.547	12	994.685.547	12	994.685.547	12	1.004.685.547
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					**442.070.216**		**449.070.216**		**453.570.216**		**455.070.216**		**463.065.998**
	Persentase laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun kabupaten/kota terhadap target yang telah ditetapkan	persen	100	100		100	0	100		100	0	100	
	Persentase ketersediaan informasi publik bidang lingkungan hidup	persen	100	100		100		100		100		100	
2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	3	3	201.035.108	3	204.535.108	3	206.785.108	3	207.535.108	3	211.532.999
2.11.03.2.02.0004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan													
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	laporan	1	2	241.035.108	2	244.535.108	2	246.785.108	2	247.535.108	2	251.532.999
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					**468.219.851**		**518.219.851**		**524.545.538**		**524.545.538**		**530.545.538**
	Cakupan luasan penghijauan	Ha	75	80		85		90		95		95	
2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi													
	Luasan area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	0	1	468.219.851	1	518.219.851	1	524.545.538	1	524.545.538	1	530.545.538
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					**2.282.474.817**		**2.523.950.667**		**2.629.052.196**		**2.648.357.854**		**2.693.895.902**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					**2.282.474.817**		**2.523.950.667**		**2.629.052.196**		**2.648.357.854**		**2.693.895.902**
	Persentase pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	2	1.807.543.318	2	1.907.543.318	1	1.962.644.847	2	1.972.644.847	1	1.993.182.895
2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	unit	2	2	187.454.656	2	187.454.656	2	197.454.656	2	197.454.656	2	202.454.656
2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan													
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	1	1	287.476.843	2	428.952.693	3	468.952.693	3	478.258.351	3	498.258.351
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					**257.012.158**		**284.202.919**		**296.037.605**		**298.211.468**		**303.339.162**
	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	68	72		74		76		78		80	
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3					**167.370.758**		**167.370.758**		**167.370.758**		**167.370.758**		**171.198.236**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	%	55	60		65		70		75		80	
2.11.05.2.01.0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem pelayanan Perizinaan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)													
	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	dokumen	38	48	94.646.358	52	94.646.358	58	94.646.358	62	94.646.358	66	95.251.930
2.11.05.2.01.0006 Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3													
	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	usaha	45	49	72.724.400	51	72.724.400	53	72.724.400	55	72.724.400	57	75.946.306
2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota					**89.641.400**		**116.832.161**		**128.666.847**		**130.840.710**		**132.140.926**
	Persentase Limbah B3 yang terkumpul	%	50	52		54		56		58		60	
2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	dokumen	1	6	54.641.400	6	78.832.161	6	88.666.847	6	87.840.710	6	86.140.926
2.11.05.2.02.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di Kabupaten/Kota													
	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 dikabupaten/kota yang tersedia	unit	1	1	35.000.000	1	38.000.000	1	40.000.000	1	43.000.000	1	46.000.000
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					**496.171.071**		**548.663.800**		**571.511.079**		**575.707.799**		**585.606.994**
	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan	%	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	%	88,62	88,69		88,71		88,73		88,75		88,77	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**496.171.071**		**548.663.800**		**571.511.079**		**575.707.799**		**585.606.994**
	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	kegiatan	2	2		2		2		2		2	
	Persentase ijin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	laporan	75	33	247.939.286	35	272.939.286	37	285.786.565	39	289.983.285	41	299.882.480
2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	516	520	248.231.785	540	275.724.514	560	285.724.514	580	285.724.514	600	285.724.514
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**2.628.621.450**		**2.906.718.099**		**3.027.758.705**		**3.049.992.145**		**3.102.436.224**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	70	75,25		75,5		75,75		76		76,25	
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**2.628.621.450**		**2.906.718.099**		**3.027.758.705**		**3.049.992.145**		**3.102.436.224**
	Persentase terlaksananya pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terselenggara	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup													
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	3	4	433.487.300	4	504.290.000	4	619.504.500	4	635.479.725	4	652.253.711
2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat													
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	664	889	2.195.134.150	964	2.402.428.099	1039	2.408.254.205	1214	2.414.512.420	1414	2.450.182.513
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**249.262.484**		**275.633.364**		**287.111.199**		**289.219.514**		**294.192.591**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	30,26	34,52		35,94		37,36		38,78		40,2	
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**249.262.484**		**275.633.364**		**287.111.199**		**289.219.514**		**294.192.591**
	Persentase terlaksananya penghargaan lingkungan yang di selenggarakan	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	orang	60	80	249.262.484	90	275.633.364	110	287.111.199	130	289.219.514	150	294.192.591
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					**96.278.347**		**106.464.174**		**110.897.521**		**111.711.863**		**113.632.729**
	Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota					**96.278.347**		**106.464.174**		**110.897.521**		**111.711.863**		**113.632.729**
	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti pertahun	kasus	55	58		60		62		64		66	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota													
	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	perkara	55	58	69.466.306	60	71.468.130	62	78.651.675	64	79.290.665	66	78.391.684
2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
	Jumlah Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Yang ditindaklanjuti/dikelola	pengaduan	7	7	26.812.041	7	34.996.044	7	32.245.846	7	32.421.198	7	35.241.045
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					**83.345.652.472**		**92.157.350.137**		**96.035.979.242**		**96.891.220.102**		**98.200.388.684**
	Persentase pengelolaan sampah	%	99,01	99,11		99,16		99,21		99,26		99,31	
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah					**83.345.652.472**		**92.157.350.137**		**96.035.979.242**		**96.891.220.102**		**98.200.388.684**
	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	persen	27,67	31,57		33,15		34,72		36,29		37,86	
	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	persen	71,84	68,43		66,86		65,28		63,71		62,14	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	30	33	1.953.608.400	34	1.949.193.000	35	2.031.652.650	36	2.031.652.650	37	1.109.147.047
2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	dokumen	3	3	12.014.281.715	3	11.242.321.354	3	12.006.455.270	3	13.045.721.070	3	13.155.638.450
2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	32	22	7.071.996.609	23	10.767.017.289	24	12.668.215.303	25	12.693.582.143	26	13.562.782.870

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	2	2	98.800.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan Saran Penanganan Sampah													
	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	165	170	7.390.194.898	182	9.471.860.389	194	10.749.175.536	206	9.087.494.327	218	14.975.942.005
2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan													
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	ton	363	500	50.415.044.045	550	52.810.906.185	600	53.260.221.494	650	53.832.002.569	700	48.758.019.369
2.11.11.2.01.0015 Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah													
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	254	263	1.818.404.997	271	2.304.787.800	279	1.615.093.443	286	2.418.017.800	296	2.806.109.400
2.11.11.2.01.0023 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	dokumen	2	2	1.517.488.186	2	1.673.028.520	3	1.756.679.946	2	1.844.513.943	2	1.894.513.943
2.11.11.2.01.0030 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah													
	Jumlah sampah yang terdaur ulang	ton	118.943	153.333	1.065.833.622	167.875	1.838.235.600	185.070	1.848.485.600	194.993	1.838.235.600	210.862	1.838.235.600
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**46.551.468.529**		**51.821.830.458**		**54.115.737.288**		**54.537.095.377**		**55.530.991.848**
	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas	%	100	100		100		100		100		100	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	%	89	90,25		90,5		90,75		91		91,25	
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**58.952.677**		**58.952.677**		**58.952.677**		**58.952.677**		**58.952.677**
	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	3	1.267.552	3	1.267.552	3	1.267.552	4	1.267.552	4	1.267.552

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Dinas Lingkungan Hidup													
	Jumlah Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup Hasil Koordinasi enyusunan Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	1.244.900	1	1.244.900	1	1.244.900	1	1.244.900	1	1.244.900
2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Dinas Lingkungan Hidup													
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	1.334.900	1	1.334.900	1	1.334.900	1	1.334.900	1	1.334.900
2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-Dinas Lingkungan Hidup													
	Jumlah Dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	1.244.900	1	1.244.900	1	1.244.900	1	1.244.900	1	1.244.900
2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- Dinas Lingkungan Hidup													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Dinas Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	1.334.900	1	1.334.900	1	1.334.900	1	1.334.900	1	1.334.900

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	5	4	2.525.525	4	2.525.525	4	2.525.525	4	2.525.525	4	2.525.525
2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
2.11.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**23.100.874.326**		**24.055.307.184**		**25.183.814.633**		**26.368.080.854**		**27.610.887.121**
	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	100	160	22.608.657.156	160	23.563.090.014	160	24.669.584.514	160	25.830.737.140	160	27.049.274.131
2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	490.258.970	12	490.258.970	12	512.271.919	12	535.385.514	12	559.654.790
2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup	laporan	1	1	561.000	1	561.000	1	561.000	1	561.000	1	561.000
2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Dinas Lingkungan Hidup													
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Lingkungan Hidup	laporan	12	12	448.600	12	448.600	12	448.600	12	448.600	12	448.600
2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	948.600	1	948.600	1	948.600	1	948.600	1	948.600
2.11.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**121.334.900**		**121.334.900**		**121.334.900**		**121.334.900**		**121.334.900**
	Nilai layanan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	nilai	n/a	87,93		88,13		88,33		88,53		88,73	87,93
2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	n/a	189	1.334.900	189	1.334.900	189	1.334.900	189	1.334.900	189	1.334.900
2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	n/a	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.632.099.545**		**1.595.089.201**		**1.597.772.655**		**1.597.772.655**		**1.711.599.545**
	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup	%	89	90,25		90,5		90,75		91		91,25	
2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	6	161.330.919	6	166.897.465	6	161.330.919	6	161.330.919	6	161.330.919
2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	3	59.754.700	3	59.754.700	3	59.754.700	3	59.754.700	3	59.754.700
2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu													
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	185.000.000	12	191.750.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Lingkungan Hidup													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Lingkungan Hidup	laporan	12	12	404.463.990	12	468.963.990	12	468.963.990	12	468.963.990	12	468.963.990
2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Lingkungan Hidup													
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Lingkungan Hidup	dokumen	8	10	821.549.936	8	707.723.046	8	707.723.046	8	707.723.046	8	821.549.936
2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**494.123.147**		**530.747.628**		**554.785.009**		**580.024.260**		**606.525.473**
	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	%	n/a	100		100		100		100		100	
2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	22	22	494.123.147	22	530.747.628	22	554.785.009	22	580.024.260	22	606.525.473
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.456.976. 108**		**4.015.951. 108**		**4.015.951. 108**		**4.015.951. 108**		**4.015.951. 108**
	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	820.177.308	12	820.177.308	12	820.177.308	12	820.177.308	12	820.177.308
2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	636.798.800	12	3.195.773.800	12	3.195.773.800	12	3.195.773.800	12	3.195.773.800
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**19.687.107.826**		**21.444.447.760**		**22.583.126.306**		**21.794.978.923**		**21.405.741.024**
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	3	3	152.903.870	3	152.903.870	3	152.903.870	3	152.903.870	3	152.903.870
2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	unit	21	21	17.762.131.709	22	19.027.386.292	23	19.561.879.585	24	18.754.105.206	24	18.337.953.121

URUSAN / BIDANG URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel													
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	16	16	264.758.024	16	277.995.925	16	291.895.721	16	306.490.507	16	321.815.033
2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	200	200	272.150.499	200	292.648.878	200	297.995.925	200	297.995.925	200	297.995.925
2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	10	12	1.235.163.724	10	1.693.512.795	10	2.278.451.205	10	2.283.483.415	10	2.295.073.075

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut .

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Timbulan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	14,17	17,96	21,76	25,55	29,34	33,13	
2.	Indeks Kualitas Air	indeks	57,71	57,81	57,91	58,01	58,11	58,21	
3.	Indeks Kualitas Udara	indeks	82,63	82,64	82,65	82,66	82,67	82,68	
4.	Indeks Kualitas Lahan	indeks	44,43	44,44	44,45	44,46	44,47	44,48	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Poin	64,89	64,94	64,98	65,03	65,07	65,11	
	a. Indeks Kualitas Air	indeks	57,71	57,81	57,91	58,01	58,11	58,21	
	b. Indeks Udara	indeks	82,63	82,64	82,65	82,66	82,67	82,68	
	c. Indeks Kualitas Lahan	indeks	44,43	44,44	44,45	44,46	44,47	44,48	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:								
	a. Persentase pengurangan timbulan sampah	%	30	31,57	33,15	34,72	36,29	37,86	
	b. Persentase penanganan timbulan sampah	%	70	68,43	66,86	65,28	63,71	62,14	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	%	88,67	88,69	88,71	88,73	88,75	88,77	

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Daerah Kab/Kota								
4.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Ton CO2Eq	569.246,19	858.546,65	1.224.280,59	1.822.881,50	2.497.915,89	3.247.290,66	
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
5.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,54	36,55	38,02	39,49	40,97	43,18	
6.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	30	30,75	32,2	33,36	33,73	34,83	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup.

Permasalahan lingkungan hidup sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki daerah dan perangkat daerah yang diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, daerah hingga nasional.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur tentang penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah hal ini sesuai amanat dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun periode Tahun 2024-2029 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan masih bersifat indikatif. Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan

serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan, bidang atau fungsi kependudukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, dan sejalan dengan strategi dan kebijakan RPJMD sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Selain hal tersebut Pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini terkait dengan pembangunan di bidang Administrasi Kependudukan untuk tercapainya sasaran pembangunan kependudukan nasional.

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Sehubungan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang sebagai sebuah

perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renstra Disdukcapil Kota Semarang juga perlu memperhatikan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta Renstra dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Disdukcapil, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdukcapil Kota Semarang.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini diselenggarakan dengan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda Kota Semarang dan pemangku kepentingan lainnya, selain itu juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2030 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok.

Proses penyusunan Renstra Disdukcapil Kota Semarang dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Dalam implementasinya Renstra Disdukcapil Kota Semarang tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada pemerintah, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan Kota Semarang, yang dituangkan melalui Laporan berbagai jenis Laporan Penyelenggaraan Urusan Kependudukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, DPRD dan Pemerintahan diatasnya.

Tahapan penyusunan Renstra dan hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

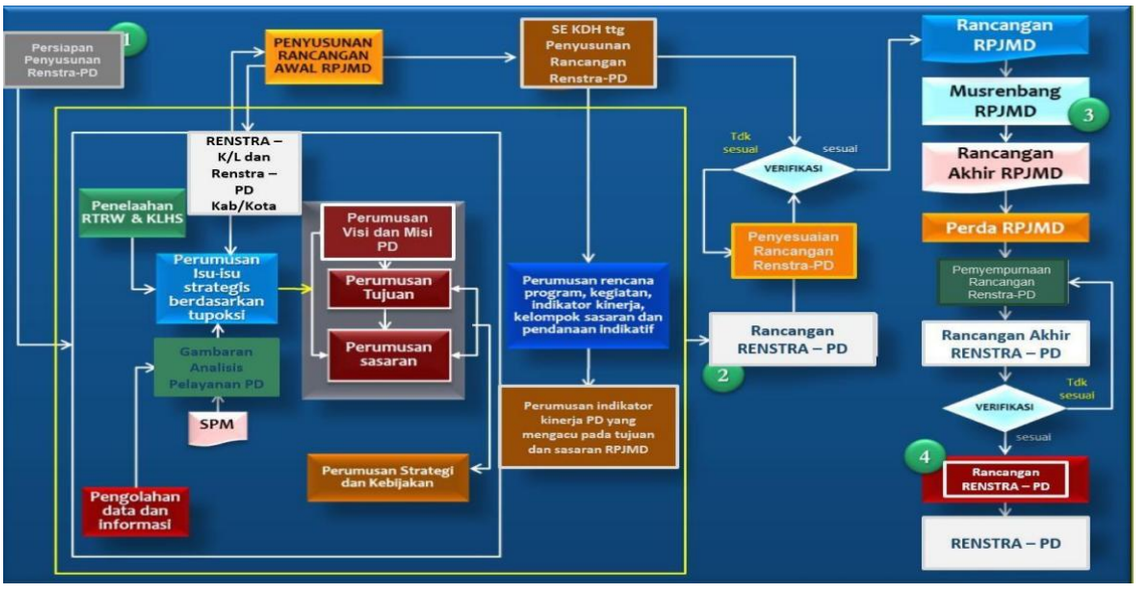

Gambar 0.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM PENYUSUNAN PRA RANCANGAN AWAL RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029 ADALAH :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
30. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
31. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045;
32. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 25 Agustus 2025 nomor B/4121/000.7.2.2/VIII/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029;
33. Surat Edaran Wali Kota Semarang nomor B/661/000.7.6.1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadikan pedoman dalam merencanakan dan merumuskan rencana kerja serta program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan kependudukan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk Tahun 2025-2029;

2. Mempermudah pengendalian kegiatan dan sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, pemantauan, analisis dan evaluasi kegiatan dan sub kegiatan kependudukan;
3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan administrasi kependudukan;
4. Menjadi alat bantu dalam rangka mempermudah penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara terarah dan terukur.

Renstra Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, program dan kegiatan pembangunan serta sebagai tolok ukur kinerja bagi seluruh jajaran staf dalam mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara berkesinambungan serta implementasi RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Penyusunan Renstra Dispendukcapil Kota Semarang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta untuk dapat mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan kependudukan dalam waktu lima tahun secara efektif dan efisien;
2. Mempertajam prioritas pembangunan kependudukan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal yang telah direncanakan;
3. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan kependudukan dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan yang berkesinambungan;
4. Menjamin tersedianya rencana program berbais kinerja berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
5. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur;
6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

7. Merumuskan rencana kerangka pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Disdukcapil Kota Semarang
- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.1.2 Sumber Daya Disdukcapil Kota Semarang
- 2.1.3 Kinerja Disdukcapil Kota Semarang
- 2.1.4 Komitmen Pimpinan
- 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.1.6 Mitra Disdukcapil Kota Semarang dalam Memberikan Layanan
- 2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja
- 2.1.8 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Disdukcapil Kota Semarang
- 2.1.9 Inovasi Disdukcapil Kota Semarang
- 2.1.10 Penghargaan Disdukcapil Kota Semarang
- 2.1.11 Tantangan dan Peluang Disdukcapil Kota Semarang

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Disdukcapil Kota Semarang
- 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya
- 2.2.3 Penentuan Isu-isu Strategis Disdukcapil Kota Semarang

2.3 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
2.4 Penelaahan Terhadap P3MKM (Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat)
- 2.4.1 Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender
- 2.4.2 Kota Layak Anak pada Urusan Administrasi Kependudukan
- 2.4.3 GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) Terkait Administrasi Kependudukan
- 2.4.4 P3KE (Pensasaran, Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan Stunting

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil Kota Semarang
3.2 Strategi dan Kebijakan
- 3.2.1 Strategi
- 3.2.2 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.2 Program Prioritas
4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Disdukcapil Kota Semarang
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan
4.4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
4.4.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Serta turut diatur dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dan UPTD;
d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan UPTD;
h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan UPTD;
i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten / Kota, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang termasuk Dinas dengan klasifikasi tipe A dengan struktur organisasi yang mampu mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang besar.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut yang mendasarkan pada Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Berikut adalah bagan struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Gambar 0-2 Struktur Organsasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

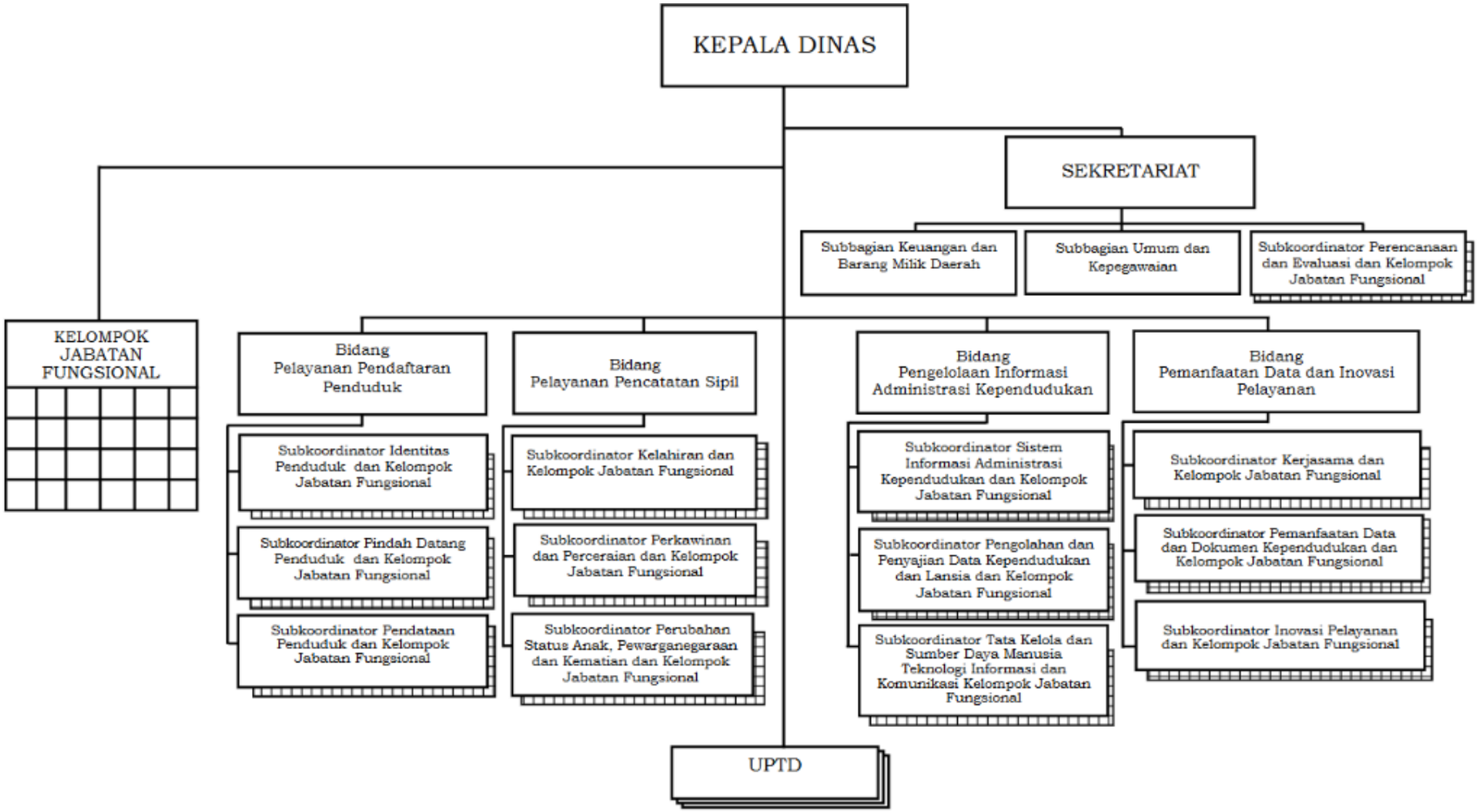

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Struktur organisasi di Sekretariat, terdiri dari:
   i. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
   ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   iii. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.

c. Kepala Bidang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subkoordinator Identitas Penduduk, Subkoordinator Pindah Datang Penduduk dan Subkoordinator Pendataan Penduduk. Struktur organisasi di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
   i. Subkoordinator Identitas Penduduk;
   ii. Subkoordinator Pindah Datang Penduduk; dan
   iii. Subkoordinator Pendataan Penduduk.

d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subkoordinator Kelahiran, Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian dan Subkoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Struktur organisasi di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, tediri dari:
   i. Subkoordinator Kelahiran;
   ii. Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian; dan
   iii. Subkoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi. Struktur organisasi di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
   i. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
   ii. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;dan

iii. Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

f. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subkoordinator Kerjasama, Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Subkoordinator Inovasi Pelayanan. Struktur organisasi di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
   i. Subkoordinator Kerjasama;
   ii. Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
   iii. Subkoordinator Inovasi Pelayanan.

g. Kelompok Jabatan Fungional.

2.1.2 SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memerlukan sumber daya yang memadai untuk mendapatkan kinerja yang terbaik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya yang dimaksud terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

a. Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diklasifikasikan ke dalam klasifikasi ASN dan Tenaga Alih Daya. Komposisi pegawai ASN dan tenaga alih daya berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Tenaga Alih Daya Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Disdukcapil Kota Semarang
Per Agustus Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN (PNS & PPPK)		Non PNS (Alih Daya)		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	15	9	2	2	28
4	D3	8	16	-	2	26
5	S1	17	17	2	2	38
6	S2	4	3	-	-	7
7	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		44	45	4	6	99

Tabel 0.3 Jumlah Pegawai PNS
Berdasarkan Pangkat dan Golongan per Agustus Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	7 Orang
2	Golongan III	37 Orang
3	Golongan II	21 Orang
Jumlah		65 Orang

Tabel 0.4 Jumlah Pegawai PNS
Berdasarkan Jabatan Struktural per Agustus Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	0 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5	Subkoordinator	10 Orang
Jumlah		16 Orang

b. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengelola sejumlah aset yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang tersebar di TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) yang berlokasi di 10 (sepuluh) Kecamatan dan di Dinas. Perkembangan aset yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang hingga Bulan Agustus 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 0.8
Perkembangan Aset Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021- 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2021	2022	2023	2024	Per Agustus 2025
	ASET	**28.255.125.491**	**29.583.008.355**	**32.255.857.475**	**33.066.639.595**	**33.066.639.595**
	ASET TETAP					
1	Tanah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2	Peralatan dan Mesin	17.436.986.492	18.722.559.377	22.074.011.636	22.248.500.596	22.248.500.596
3	Gedung dan bangunan	10.214.808.299	10.214.808.299	10.214.808.299	10.214.808.299	10.214.808.299
4	Jaringan	414.230.700	414.230.700	30.125.000	30.125.000	30.125.000
5	Aset tetap lainnya	89.100.000	89.100.000	89.100.000	89.100.000	89.100.000
	ASET LAINNYA					
1	Aset Tidak Berwujud	346.220.000	346.220.000	346.220.000	346.220.000	346.220.000
2	Aset Lain-lain	133.457.000	133.457.000	133.457.000	120.707.000	120.707.000
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(346.220.000)	(346.220.000)	(346.220.000)	(346.220.000)	(346.220.000)
	Akumulasi Penyusunan Aset Lainnya	(346.220.000)	(346.220.000)	(133.457.000)	(133.457.000)	(133.457.000)

Adapun aset yang berupa aset tanah dan gedung atau bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan data per Bulan Agustus 2025 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Aset Tanah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
Per Agustus Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah	3.614 m²	1992	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	Hak Pakai	27-11-2015	19	Kantor	Tanah Milik Pemkot Semarang	Rp 100.000.000,-	-

Tabel 2.10
Aset Gedung dan Bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
per Agustus Tahun 2025

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)
1	Gedung Kantor Bertingkat	Baik	3.350 m²	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	3.350 m²	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 4.425.766.250,-
2	Gedung Kantor Permanen (Gedung Arsip)	Baik	277 m²	Gedung Arsip Disdukcapil : Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	277 m²	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 75.000.000,-
3	Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Tempat Parkir)	Baik	10 m²	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	10 m²	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 39.900.000,-

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)
4	Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Parkir Mobil)	Baik	10 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	10 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 48.837.000,-
5	Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Prasarana Paving)	Baik	500 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	500 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 49.350.000,-
6	Gedung Kantor Permanen (Unit Layanan Banyumanik)	Baik	463,06 m^2	Jl. Prof. Soedarto No. 116 Semarang	463,06 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 176.606.167,-
7	Gedung Kantor Permanen (Unit Layanan Ngaliyan)	Baik	463,06 m^2	Jl. Raya Ngaliyan No. 234 Semarang	463,06 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 176.605.166,-
8	Gedung Kantor Permanen (Unit Layanan Genuk)	Baik	130 m^2	Jl. Dong Biru No. 12 Semarang	130 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 285.817.513,-
9	Gedung Kantor Permanen (Unit Layanan Gunungpati)	Baik	130 m^2	Jl. MR. Wuryanto No. 33 Semarang	130 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 285.918.269,-
10	Gedung Kantor Permanen (Unit Layanan Gunungpati)	Baik	130 m^2	Jl. MR. Wuryanto No. 33 Semarang	130 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 285.918.269,-
11	Gedung Kantor Permanen (Unit Layanan Semarang Timur)	Baik	130 m^2	Jl. Krakatau VIII No. 8 Semarang	130 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 287.205.278,-
12	Pagar Permanen (Pagar Kantor Unit Layanan Ngaliyan)	Baik	463,06 m^2	Jl. Raya Ngaliyan No. 234 Semarang	463,06 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 39.849.411,-
13	Pagar Permanen (Tralis Besi)	Baik	439,50 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	439,50 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 69.638.800,-

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)
14	Gedung Kantor Semi Permanen (Sekat Kantor)	Baik	48 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	48 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 59.567.000,-
15	Gedung Kantor Lain-lain (Backdrop Lapis)	Baik	73,20 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	73,20 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 74.998.374,-
16	Gedung Kantor Semi Permanen (Office Cabinet)	Baik	12 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	12 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 14.767.000,-
17	Gedung Instalasi Permanen (Office Cabinet)	Baik	33 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	33 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 39.000.000,-
18	Gedung Pos Jaga	Baik	2,3 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Gayamsari, Semarang	2,3 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 39.950.000,-
19	Pagar Permanen (Tralis Unit Layanan Semarang Barat)	Baik	39 m^2	Jl. Ronggolawe No. 2 Semarang	39 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 23.975.000,-
20	Pagar Permanen (Tralis Unit Layanan Semarang Selatan)	Baik	39 m^2	Jl. Ronggolawe No. 2 Semarang	39 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 23.975.000,-
21	Pagar Permanen (Tralis Unit Layanan Pedurungan)	Baik	39 m^2	Jl. Ronggolawe No. 2 Semarang	39 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 23.975.000,-
22	Pagar Permanen (Tralis Unit Layanan Semarang Timur)	Baik	446,79 m^2	Jl. Krakatau VIII No. 8 Semarang	446,79 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 18.662.770,-
23	Pagar Permanen (Tralis Unit Layanan Semarang Utara)	Baik	39 m^2	Jl. Krakatau VIII No. 8 Semarang	39 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 23.975.000,-
24	Gedung Kantor Semi Permanen (Smoking Area)	Baik	1.515 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang	1.515 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 45.000.000,-

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)
25	Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen (Mushola)	Baik	30 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang	30 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 89.500.000,-
26	Bangunan Parkir Terbuka	Baik	46 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang	46 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 29.500.000,-
27	Pagar Permanen (Tralis Unit Layanan Banyumanik)	Baik	76 m^2	Jl. Prof. Soedarto No. 116 Semarang	76 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 47.300.000,-
28	Gedung Kantor Permanen (Unit Layanan Candisari)	Baik	76 m^2	Jl. Kesatrian Semarang	76 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 517.572.298,-
29	Bangunan Parkir Terbuka Permanen (Tempat Parkir Unit Layanan Candisari	Baik	310 m^2	Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang	310 m^2	Milik Pemkot Semarang	Pembelian	Rp 172.162.711,-

Aset yang dikelola baik dalam bentuk aset tetap dan aset tidak berwujud seluruhnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Dinas dan 10 (sepuluh) TPDK Kecamatan. Pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2024 yang masuk dalam pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 0.11 Perkembangan Aset Gedung dan Kendaraan Bermotor per Agustus Tahun 2025

No	Jenis Aset	Volume	Kondisi
1.	Tanah	3.614 m²	Baik
2.	Gedung Kantor Bertingkat	3.350 m²	Baik
3.	Gedung Kantor Tidak Bertingkat	10 unit (3.061,5 m²)	Baik
4.	Bangunan Gedung Arsip	277 m²	Baik
5.	Mushola	30 m²	Baik
6.	Bangunan Rumah Genset	33 m²	Baik
7.	Gedung Pos Jaga	2.3 m²	Baik
8.	Kendaraan Bermotor Roda 2	17 unit	Baik
9.	Kendaraan Bermotor Roda 4	6 unit	Baik
10.	Kendaraan Bermotor Roda 6	1 Unit	Baik

Tabel 0.12 Perkembangan Aset Peralatan per Agustus Tahun 2025

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi
1.	Lemari Besi/Metal	26 Buah	Baik
2.	Rak Besi	131 Buah	Baik
3.	A.C. Sentral	11 Buah	Baik
4.	A.C. Split	99 Buah	Baik
5.	Mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	6 Buah	Baik
6.	Filing Cabinet Besi	53 Buah	Baik
7.	Papan Nama Instansi	12 Buah	Baik
8.	Meja Kerja Kayu	9 Buah	Baik
9.	Kursi Fiber Glas/Plastik	1 Buah	Baik
10.	Kursi Tamu	183 Buah	Baik
11.	Kursi Putar	79 Buah	Baik
12.	Meubeleur lainnya	15 Buah	Baik
13.	Kipas Angin	19 Buah	Baik
14.	Televisi	18 Buah	Baik
15.	Dispenser	45 Buah	Baik
16.	Alat Pembantu Kebakaran	16 Buah	Baik
17.	Meja Operator	5 Buah	Baik
18.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	25 Buah	Baik
19.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	43 Buah	Baik

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi
20.	Camera Digital	1 Buah	Baik
21.	Genset	19 Buah	Baik
22.	Personal Computer	95 Unit	Baik
23.	Meja Kerja	57 Buah	Baik
24.	Meja Kerja Kayu	29 Buah	Baik
25.	Monitor	5 Buah	Baik
26.	LCD Monitor	14 Buah	Baik
27.	Printer	181 Buah	Baik
28.	Peralatan Personal Komputer lainnya	34 Buah	Baik
29.	Tenda	12 Unit	Baik
30.	Kursi Besi/Metal	29 Buah	Baik
31.	Meja Resepsionis	4 Buah	Baik
32.	Kursi Tamu	122 Buah	Baik
33.	Meja Komputer	57 Buah	Baik
34.	Gordyin/Kray	6 Buah	Baik
35.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	112 Buah	Baik
36.	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1 Buah	Baik
37.	Rak-Rak Penyimpan	6 Buah	Baik
38.	Lemari Besi/Metal	26 Buah	Baik
39.	CCTV - Camera Control Television System	28 Buah	Baik
40.	Note Book	1 Buah	Baik
41.	Scanner	78 Buah	Baik
42.	Pompa Air	6 Buah	Baik
43.	Lemari Kayu	7 Buah	Baik
44.	Mesin Absensi	7 Buah	Baik
45.	Exhause Fan	9 Buah	Baik
46.	Sound System	1 Unit	Baik
47.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	Baik
48.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15 Buah	Baik
49.	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	1 Buah	Baik
50.	Alat Penguji Penerapan Udara Air	3 Buah	Baik
51.	Lap Top	27 Buah	Baik
52.	Komputer Unit Lainny	26 Buah	Baik
53.	Buku Umum Lain-lain	2 Buah	Baik
54.	Card Reader	27 Buah	Baik
55.	LCD Projector/Infocus	4 Unit	Baik
56.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	70 Buah	Baik
57.	Server	3 Unit	Baik
58.	Router	27 Unit	Baik
59.	Telephone Mobile	4 Unit	Baik
60.	Pompa Air	6 Unit	Baik
61.	Kunci Sinyal	1 Buah	Baik

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi
62.	Pesawat Telephone	31 Unit	Baik
63.	Hard Disk	5 Unit	Baik
64.	Monitor	6 Unit	Baik
65.	Tablet PC	12 Unit	Baik
66.	Amplifier	1 Buah	Baik
67.	Loudspeaker	4 Buah	Baik
68.	Camera Electronic	5 Buah	Baik
69.	Mesin Barcode	3 Buah	Baik
70.	Handy Talky (HT)	2 Buah	Baik
71.	Bangku Panjang Besi/Metal	5 Unit	Baik
72.	Kursi Lipat	56 Buah	Baik
73.	Video Conference	1 Buah	Baik
74.	Mesin Cetak	1 Buah	Baik
75.	Lemari Penyimpan	1 Buah	Baik
76.	Meja Podium	1 Unit	Baik
77.	CAT 6 Cable	6 Unit	Baik
78.	Switch	11 Buah	Baik
79.	Layar Film/Projector	2 Unit	Baik
80.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2 Unit	Baik
81.	Alat Pembersih lainnya	1 Buah	Baik
82.	Camera Video	1 Buah	Baik
83.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	Baik
84.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	15 Buah	Baik
85.	Microphone/Wireless MIC	6 Buah	Baik
86.	Tablet PC	6 Buah	Baik
87.	P.C. Unit	20 Unit	Baik
88.	Buku Umum Lain-lain	2 Buah	Baik
89.	Lemari Kaca	3 Buah	Baik
90.	Alat Studio Video Lainnya	1 Buah	Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa aset sarana prasarana kantor Disdukcpail Kota semarang mencukupi dari segi jumlah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, dari segi kondisi aset sarana prasarana kantor semuanya berada dalam kondisi yang baik. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang dimiliki dapat menjadi penunjang untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga lebih terarah dan tepat sasaran, sesuai dengan arah tujuan Pemerintah Daerah.

2.1.3 KINERJA PELAYANAN DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

a. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah indikator penting apakah penyelenggaraan kewenangan pemerintah dan aparatur sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain kualitas pelayanan publik adalah pertanda langsung tercapai atau tidaknya kepemerintahan yang baik. Reformasi pelayanan publik dimulai dari aspek yang paling mendasar yaitu reformasi pola pikir (paradigma) penyelenggara pelayanan publik. Reformasi paradigma ini adalah penggeseran pola penyelenggara pelayanan publik dari semula "*berorientasi pemerintah sebagai penyedia*" menjadi pelayan yang "*berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna*".

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas. Upaya yang telah ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja untuk menunjang pelayan publik yang berkualitas, dimana harapannya akan mampu membangun citra yang baik pada proses penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Sesuai pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dengan jumlah penduduk 1.702.379 jiwa pada akhir tahun 2024. Kinerja Pelayanan adalah Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran/target Renstra periode sebelumnya pada masing-masing indikator aspek pelayanan umum dalam bidang kependudukan dan catatan sipil dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 0.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satu-an	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-							Realisas Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24
A	*Indikator Tujuan*																		
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	90,00	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	89,42	88,03	88,25	90,09	93,75	99,35	96,75	96,45	97,92	101,35
B	*Indikator Sasaran*																		
1	Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan	%	78,00	79,42	88,86	93,52	94,20	94,88	95,54	90,89	91,28	91,82	92,85	93,75	116,52	114,93	103,33	99,28	99,52
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85,00	87,00	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	82,00	82,80	85,29	87,09	93,37	96,47	95,17	102,76	104,30	111,15
3	Nilai SAKIP	Skor	73,00	75,66	75,70	75,80	79,50	80,10	80,15	70,37	76,50	77,21	79,30	80,00	96,37	101,11	101,99	104,62	100,63
C	*Indikator IKK*																		
1	Perekaman KTP Elektronik	%	100	100	99,30	99,40	99,60	99,37	99,40	98,11	95,07	96,93	99,57	99,35	98,11	95,07	97,61	100,17	99,75
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	90	75,00	68,00	71,00	74,00	73,00	74,00	60,57	61,79	64,31	66,45	71,06	67,30	82,39	94,57	93,59	96,03
3	Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun	%	95	96,00	97,00	97,20	98,30	98,40	98,50	93,42	96,57	97,85	98,25	98,35	98,33	99,54	100,88	101,08	100,05

NO	Indikator Kinerja	Satu-an	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-							Realisas Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang 2dilaporkan	%	100	97,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	102,56	100,00	100,00	100,00
5	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	50	81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200,00	123,46	100,00	100,00
6	Penyajian Data Kependudukan Skala Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.	*Indikator Dirjen Dukcapil*																		
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	100	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	99,45	98,11	95,07	96,93	99,57	99,35	98,11	95,83	97,61	100,17	99,94
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	90	40	45	50	60	62	74	60,57	61,79	64,31	66,45	71,06	67,30	154,48	142,91	132,9	118,43
3.	Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun	%	95	95	97	98	100	99,5	98,45	93,42	95,56	97,85	98,25	98,35	98,33	100,58	100,87	100,25	98,35
E.	*Indikator SPM*																		
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	*Indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*																		

NO	Indikator Kinerja	Satu-an	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-							Realisas Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24
1.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-5 Tahun	%	na	na	na	na	na	na	na	98,66	99,07	99,44	99,62	99,64	na	99,07	99,44	99,62	99,64
2.	Kepemilikan akta kelahiran 0-17 Tahun pada 40% pendapatan terbawah	%	na	na	na	na	na	na	na	93,97	95,56	97,85	98,25	98,35	na	95,56	97,85	98,25	98,35
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran per jumlah penduduk	%	na	na	na	na	na	na	na	80,12	80,45	81,28	81,62	81,84	na	80,45	81,28	81,62	81,84

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tetang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang bertujuan untuk memperbaiki administrasi kependudukan. Beberapa keuntungan dari penyederhanaan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini antara lain :

a. Memberikan kemudahan dalam pelayanan publik urusan administrasi kependudukan;
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan;
c. Mengurangi persyaratan tambahan untuk mengurus administrasi kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bahwa berdasarkan Permendagri tersebut, pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas :

1) pencatatan biodata penduduk;
2) penerbitan KK;
3) penerbitan KTP-el;
4) penerbitan KIA;
5) penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
6) pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Sedangkan pelayanan pencatatan sipil terdiri atas :

1) kelahiran;
2) lahir mati;
3) perkawinan;
4) Pembatalan perkawinan;
5) Perceraian;
6) Pembatalan perceraian;
7) Kematian;
8) pengangkatan anak;
9) pengakuan anak;
10) pengesahan anak;
11) perubahan nama;
12) perubahan status kewarganegaraan;
13) peristiwa penting lainnya;
14) pembetulan akta pencatatan sipil;
15) pembatalan akta pencatatan sipil.

Bahwa dalam Surat Keputusan Kepela Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/3992/XI/2023 tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penyelenggaraaan pelayanan dokumen dan waktu penyelesaian yang diutuhkan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.14 Jenis Pelayanan dan Waktu Penyelesaian Dokumen Adminduk

No.	Pelayanan Dokumen	Waktu Penyelesaian
1.	Kartu Keluarga (KK)	3 hari kerja
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	1 hari kerja
3.	Kartu Identitas Anak (KIA)	3 hari kerja
4.	Surat Keterangan Pindah (SKP) dalam Kota Semarang	3 hari kerja
5.	Surat Keterangan Pindah (SKP) keluar Kota Semarang	3 hari kerja
6.	Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA	3 hari kerja

7.	Akta Kelahiran	3 hari kerja
8.	Akta Kematian	3 hari kerja
9.	Akta Perkawinan	3 hari kerja
10.	Akta Perceraian	3 hari kerja
11.	Akta Pengakuan Anak	3 hari kerja
12.	Akta Pengesahan Anak	3 hari kerja
13.	Kutipan Akta Pencatatan Sipil	3 hari kerja
14.	Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	3 hari kerja
15.	Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	3 hari kerja
16.	Penerbitan Akta Pewarganegaraan	3 hari kerja

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dalam kurun waktu tahun 2021-2026 didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas dan 10 (sepuluh) TPDK Kecamatan. Alokasi APBD Kota Semarang tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan secara luring (luar jaringan) atau pelayanan langsung dan daring (dalam jaringan) termasuk pengadaan sarana prasarana yang mendukung pelayanan adminduk daring.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Alokasi anggaran tersebut juga digunakan untuk percepatan kepemilikan akta catatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya dengan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, serta OPD baik dari lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun diluar Pemerintah Kota Semarang. Selain itu alokasi anggaran diperuntukkan untuk operasional pelaksanaan pelayanan keliling dengan menggunakan unit mobil pelayanan keliling. Dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil penyediaan sarana penunjang operasional pelayanan administrasi kependudukan menjadi hal yang penting untuk dialokasikan dalam anggaran belanja daerah, antara lain pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan kantor, penyediaan formulir dan blanko dokumen administrasi kependudukan dan sarana lain yang dibutuhkan untuk penerbitan dokumen kependudukan. Dukungan anggaran tersebut sebagai wujud keseriusan baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar, cepat dan akurat. Adapun target dan realisasi anggaran tersebut diuraikan dalam berikut ini :

Tabel 2.10 Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	22.386.503.668	18.640.135.005	21.899.376.617	20.068.156.849	20.055.894. 122	-	20.360.162. 689	17.228.419.779	21.040.043.947	19.126.424.952	-	90,95%	92,43%	96,08%	95,31%	98,08%	95,69%
Program Pendaftaran Penduduk	-	1.376.210.880	3.008.110.970	2.398.197. 397	1.410.052.505	340.613.230	-	1.319.885.350	2.791.292.523	2.380.844.329	1.386.453.656	-	95,91%	92,79%	99,28%	98,33%	95,31%	98,80%
Program Pencatatan Sipil	-	526.736.900	573.368.740	482.224.949	453.625.743	127.109.720	-	480.267.800	529.295.099	451.380.610	446.032.435	-	91,18%	92,31%	93,60%	98,33%	78,76%	95,96%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	551.744.080	360.682.278	297.352.620	443.144.582	505.265.597	-	464.471.900	321.218.000	179.502.038	426.080.774	-	84,18%	89,06%	60,37%	96,15%	102,72%	78,26%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-	40.329.300	90.617.020	118.907.880	130.907.340	134.616.095	-	38.479.500	87.244.800	114.115.020	123.143.400	-	95,41%	96,28%	95,97%	94,07%	142,21%	95,02%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.921.481. 000	-	-	-	-	-	3.752.133.652	-	-	-	-	95,68	-	-	-	-	-	95,68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.576.781. 000	-	-	-	-	-	1.608.822.474	-	-	-	-	62,44	-	-	-	-	-	62,44
Program Peningkatan Pengembangan Sistem	184.285.000	-	-	-	-	-	181.258.208	-	-	-	-	98,36	-	-	-	-	-	98,36

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.438.326.000	-	-	-	-	-	5.775.336.053	-	-	-	-	89,70	-	-	-	-	-	89,70
JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN	**27.413.287.258**	**24.881.524.828**	**22.672.914.013**	**25.196.059.463**	**22.505.882.019**	**21.163.498.764**	**24.671.551.034**	**22.663.267.239**	**20.957.470.201**	**24.165.885.944**	**21.508.135.217**	**89,99 %**	**91,08%**	**92,43 %**	**95,91 %**	**95,57%**	**96,40 %**	**95,74%**

Alokasi anggaran dana untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode lima tahun terakhir digunakan untuk membiayai 5 (lima) program dengan rata-rata pertumbuhan realisasi dana yang berbeda-beda. Dimana tahun 2020 masih menggunakan nomenklatur Program yang lama dengan capaian realisasi tahun 2020 sebesar 89,99% tergolong serapan menengah karena masih terdapat anggaran dari DAK.

Sedangkan pada tahun 2021 - 2024 terdapat Progam-program meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 95,69%, Program Pendaftaran Penduduk sebesar 98,80%, Program Pencatatan Sipil sebesar 95,96%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 78,26% dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar 95,02%.

2.1.4 KOMITMEN PIMPINAN

Dalam konteks pelayanan publik urusan administrasi kependudukan dan tata kelola pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memegang peranan penting untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”. Sedangkan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 ada 7 (tujuh) yaitu :

1) Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinnekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian;
2) Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi;
3) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak;
4) Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital;
5) Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
6) Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan,sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat;
7) Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mewujudkan Misi ke-7 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas”.

2.1.5 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang saat ini berjumlah penduduk 1.702.379 jiwa. Keseluruhan penduduk ini mulai dari bayi baru lahir hingga lansia, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang membutuhkan dokumen kependudukan resmi. Layanan Dukcapil adalah layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dari lahir hingga meniggal dunia, dengan kelompok sasaran semua umur dan sasaran utama layanan :

1. Bayi & Anak-Anak
   a. Pencatatan kelahiran (Akta Kelahiran)
   b. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk usia 0–17 tahun
2. Remaja & Dewasa
   a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (untuk WNI usia 17+ tahun)
   b. Perekaman data biometrik KTP-el (bagian dari program wajib KTP)
   c. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan perubahan data keluarga
3. Pasangan yang Menikah atau Bercerai
   a. Pencatatan perkawinan (Akta Nikah) dan pembaruan status di KK
   b. Pencatatan perceraian dan perubahan status kependudukan
4. Penduduk yang Pindah Domisili
   a. Mutasi penduduk (pindah datang, pindah keluar, atau pindahdalam wilayah)
   b. Pembaruan alamat di KTP dan KK
5. Warga Negara Asing (WNA) & Penduduk dengan Status Khusus
   a. Pencatatan izin tinggal (KITAS/KITAP) dan dokumen kependudukan terkait
   b. Layanan bagi pemohon kewarganegaraan (naturalisasi)
6. Keluarga yang Mengalami Perubahan Data
   a. Perbaikan data kependudukan (misal: kesalahan nama, tempat/tanggal lahir)
   b. Pembaruan KK karena penambahan/pengurangan anggota keluarga (kelahiran, kematian, pengangkatan anak)
7. Masyarakat yang Membutuhkan Dokumen Legalisasi
   a. Penerbitan surat keterangan kependudukan (SKCK, surat domisili, dll.)
   b. Legalisasi dokumen kependudukan untuk keperluan administrasi
8. Lansia & Ahli Waris
   a. Pencatatan kematian (Akta Kematian) dan penghapusan data penduduk
   b. Layanan terkait waris atau perubahan KK akibat ditinggal meninggal
9. Penyandang Disabilitas & Kelompok Rentan

a. Layanan inklusif (jemput bola/*mobile service*) bagi penyandang disabilitas atau masyarakat terbatas aksesnya.

2.1.6 MITRA DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bekerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan akurat, cepat, dan inklusif. Berikut adalah mitra-mitra utama Dukcapil beserta peran mereka dalam mendukung layanan kependudukan:

1. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait
   a. Kecamatan dan Kelurahan bermitra untuk memfasilitasi pendataan awal, verifikasi, dan pengajuan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
   b. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit bermitra untuk mendukung pencatatan kelahiran dan kematian melalui pelaporan kelahiran di fasilitas kesehatan (untuk percepatan penerbitan Akta Kelahiran).
   c. Dinas Pendidikan bermitra dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru setiap tahun ajaran baru.
   d. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian bermitra dalam pengembangan aplikasi Dukcapil Online, seperti layanan cetak dokumen secara mandiri atau pengaduan masyarakat di tingkat Pemerintah Daerah.
   e. Kantor Urusan Agama (KUA) mitra dalam pencatatan perkawinan dan perceraian serta koordinasi penerbitan Akta Nikah.
2. Lembaga Pendidikan dan Sekolah
   a. Sekolah dan Madrasah bermitra untuk membantu pendataan anak usia sekolah untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan.
   b. Sekolah SMA / SMK yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bermitra dalam kegiatan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah SMA/SMK.
   c. Perguruan Tinggi bermitra dalam mensosialisasikan program-program administrasi kependudukan melalui mahasiswa yang magang di Dinas ataupun mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata Bertema Adminduk.
   d. Lembaga pendidikan non formal seperti lembaga kursus bahasa dan kursus talenta untuk anak bermitra dalam hal kerjasama pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA).
3. Sektor Swasta & Penyedia Teknologi
   a. Perusahaan Fintech & Perbankan bermitra untuk kolaborasi dalam verifikasi data KTP-el untuk layanan keuangan digital.
   b. Lembaga swasta bermitra menjadi Mitra KIA dengan memberikan diskon kepada pemegang Kartu KIA sebagai nilai tambah yang dapat dimanfaatkan dengan memiliki KIA.
4. Organisasi Masyarakat & LSM

a. LSM Kependudukan: Membantu sosialisasi dan pendampingan masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk memahami pentingnya dokumen kependudukan.
b. Karang Taruna dan RT/RW berperan dalam pendataan warga dan pemutakhiran data, termasuk membantu kelompok rentan (lansia, disabilitas).

5. Institusi Penegak Hukum
   a. Kepolisian bermitra dalam erifikasi data untuk penerbitan SKCK dan pencegahan pemalsuan identitas.
   b. Kejaksaan dan Pengadilan bermitra dalam koordinasi dalam penyelesaian kasus hukum terkait administrasi kependudukan.

6. Mitra Internasional
   a. UNHCR dan Kantor Imigrasi bermitra dalam kolaborasi dalam pencatatan pengungsi atau WNA yang tinggal di Indonesia.
   b. Kedutaan Besar: Memfasilitasi WNI di luar negeri untuk layanan dokumen kependudukan melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
7. Media & Komunikasi
   a. Media Massa dan Sosial Media bermitra dalam sosialisasi, diseminasi dan penyebaran informasi kebijakan terbaru Dukcapil, seperti wawancana televisi dan radio tentang kebijakan administrasi kependudukan.

2.1.7 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dan tidak terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menaungi atau memberikan dukungan dalam bentuk anggaran ataupun dalam bentuk kerjasama CSR (*Corporate Social Responsibility*).

2.1.8 KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2021 hingga 2025 melakukan dengan kerjasama dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam hal pemanfaatan data kependudukan, diantaranya :

Tabel 2.11 Daftar OPD Ber-Perjanjian Kerjasama
Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan
Tahun 2021-2025

NO.	OPD Kota Semarang	Nomor PKS	KET
1.	Dinas Kesehatan	B/0400/019.6/I/2022 dan B/9896/415.4/V/2025	-
2.	Dinas Pendidikan	B/6329/415.4/VI/2022 dan	-
3.	Dinas Sosial	405/019.6/I/2022 dan 3139/400.13.4.3/IV/2025	-
4.	Dinas Pemadam Kebakaran	B/84/364.1/I/2022 dan B/2531/000.4.7.2/IV/2025	-
5.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	B/857/470/VI/2022	-
6.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	B/95/050/I/2022	-

NO.	OPD Kota Semarang	Nomor PKS	KET
7.	Dinas Tenaga Kerja	560/024/2022 dan B/2273/500.15.12.2/VI/2025	-
8.	RSUD KRMT Wongsonegoro	B/3320/445/IV/2022	-
9.	Badan Pembangunan Daerah	191/050/I/2022	-
10.	Badan Pendapatan Daerah	B/3143/019.6/VII/2022	-
11.	Kecamatan Ngaliyan	B/08/470/I/2022	-
12.	Kecamatan Tugu	B/133/470/IV/2022	-
13.	Kecamatan Semarang Utara	B/470/390/V/2022	-
14.	Kecamatan Pedurungan	470/25/I/2022	-
15.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	B/1363/019.6/III/2023 dan B/1192/046/III/2025	-

Selain OPD di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit, Yayasan dan lembaga lainnya baik negeri maupun swasta, serta instansi lain terkait percepatan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Rumah Sakit dan instansi yang telah berkerjasama antara lain :

Tabel 2.12 Daftar RS dan Instansi Ber-Perjanjian Kerjasama Terkait Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian Tahun 2021-2025

NO.	Lembaga Pengguna	Jenis PKS	KET
1.	RSD KRMT Wongsonegoro	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
2.	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
3.	RSUP Dr. Kariadi	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
4.	RS Bhakti Wira Tamtama	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
5.	RS Nasional Diponegoro	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
6.	RS Telogorejo	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
7.	RS St. Elisabeth Semarang	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
8.	RS Islam Sultan Agung	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
9.	RS Roemani Muhammadiyah	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
10.	RS Panti Wilasa Citarum	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
11.	RS Hermina Pandanaran	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
12.	RS Hermina Banyumanik	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
13.	RS Banyumanik 1	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
14.	RS Banyumanik 2	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
15.	RS Keluarga Sehat 3	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
16.	RS William Booth	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
17.	RS Charlie Hospital	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
18.	RS Permata Medika	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
19.	RS Primaya Semarang	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
20.	RS Cepoko	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-

NO.	Lembaga Pengguna	Jenis PKS	KET
21.	RS Siloam Semarang	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
22.	RS Samsoe Hidajat	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
23.	RS Pendidikan Unimus	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
24.	RSIA Gunung Sawo	Percepatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Fasilitas Kesehatan	-
25.	RSIA Plamongan Indah	Percepatan Akta Kelahiran melalui Fasilitas Kesehatan	-
26.	RSIA Kusuma Pradja	Percepatan Akta Kelahiran melalui Fasilitas Kesehatan	-
27.	RSIA Bunda	Percepatan Akta Kelahiran melalui Fasilitas Kesehatan	-
28.	Yayasan Bambang Purnowo	Percepatan Akta Kematian melalui Fasilitas Layanan Kematian	-
29.	CV. Santa Maria	Percepatan Akta Kematian melalui Fasilitas Layanan Kematian	-
30.	Tabitha Center	Percepatan Akta Kematian melalui Fasilitas Layanan Kematian	-
31.	YPK Arimatea	Percepatan Akta Kematian melalui Fasilitas Layanan Kematian	-

2.1.9 INOVASI DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

Dalam kurun waktu Renstra 2021-202, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan sebanyak 13 inovasi pelayanan administrasi kependudukan, diantaranya :

Tabel 2.12 Daftar Inovasi Pelayanan Disukcapil Kota Semarang

NO.	NAMA INOVASI	TGL PEMBUA-TAN	TUJUAN INOVASI	DAMPAK PENGARUH TERHADAP PELAYANAN
1	Kado Mbak Ita (Kanugrahan Dokumen Kependuduan Baru Kagem Penduduk Pitulas Tahun)	03-Apr-23	Memberikan pelayanan pengiriman KTP-el bagi Wajib KTP-el Pemula	Meningkatkan animo masyarakat khususnya Wajib KTP-el Pemula agar melakukan perekaman KTP-el saat usianya 16 tahun
2	Paket 3 in 1 (Paket Akta Kelahiran, KK, KIA atau Akta Kematian, KK, KTP-el pasangan)	07-Jan-19	Memberikan pelayanan terintegrasi berupa Akta Kelahiran, KK dan KIA atau Akta Kematian, KK dan KTP pasangan	Pemohon tidak harus melakukan permohonan berulang-ulang, tetapi cukup dengan 1 (satu) kali permohonan saja bisa mendapatkan 3 (tiga) produk sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Dukcapil
3	Jempol Tiger Japri (Jemput Bola Tim Gerak Kerja Cepat dan Responsif)	07-Jan-19	Memberikan pelayanan perekaman KTP-el datang ke rumah ditujukan bagi warga Difabel, Lansia, ODGJ dan warga yang sakit atau tidak dapat hadir ke Tempat Perekaman Data Kependudukan	Memudahkan masyarakat berkebutuhan khusus untuk melakukan perekaman KTP-el
4	Aplikasi SiDenOK (Sistem Informasi Dukcapil Online Kependudukan)	9 Maret 2020	Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Secara Daring	Memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan administrasi kependudukan, tidak perlu datang ke Dukcapil, cukup melakukan pendaftaran melalui pelayanan online

NO.	NAMA INOVASI	TGL PEMBUA-TAN	TUJUAN INOVASI	DAMPAK PENGARUH TERHADAP PELAYANAN
5	Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari	6 Agustus 2022	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menambah jam pelayanan ekstra	Memberikan pelayanan pada jam ekstra, sehingga masyarakat yang tidak dapat hadir di jam pelayanan dapat memanfaatkan pelayanan akhir pekan dan malam hari
6	Kios Adminduk	04-Sep-23	Memberikan sarana prasarana pelayanan online dan cetak mandiri yang dapat diakses masyarakat dengan mudah	Memudahkan masyarakat dalam mengakses sarana prasarana pelayanan online dan cetak mandiri produk administrasi kependudukan
7	Jas Kakak	2 Januari 2018	Meningkatkan penerbitan akta kelahiran dan kematian melalui kerjasama dengan Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran dan kematian terutama bagi pasien dari RS dan faskes
8	KIA Goes To School	14 Juni 2022	Meningkatkan kerjasama dengan Disdik, SD dan SMP untuk peningkatan penerbitan KIA	Meningkatnya kepemilikan KIA di kalangan pelajar dengan bekerjasama dengan Disdik, SD dan SMP
9	Kerjasama dengan Mitra KIA	2 Januari 2018	Meningkatkan nilai guna KIA agar dapat meningkatkan ketertarikan / animo masyarakat untuk membuat KIA	Meningkatnya kerjasama Disdukcapil dengan lembaga pemerintah maupun swasta
10	Fantastis IKD	17-Apr-23	Meningkatkan persentase capaian aktivasi IKD oleh masyarakat Kota Semarang	Meningkatnya persentase capaian aktivasi IKD
11	Praja Gamer (Praktik Kerja dan Magang Merdeka)	27 Mei 2024	Pendayagunaan mahasiswa magang untuk dapat membantu Disdukcapil dalam sosialisasi adminduk kepada masyarakat melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)	Meningkatknya kesadaran masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan
12	Anti Mager (Pendayagunaan KKN Tematik dan Magang Merdeka)	27 Mei 2024	Melaksanakan rencana aksi dari Praja Gamer dengan memberdayakan mahasiswa KKN untuk mensosialisasikan urusan adminduk di wilayah KKN mahasiswa	Meningkatknya kesadaran masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan
13	E-Pakem (Elektronik Pelaporan Kematian)	4 Agustus 2024	Meningkatkan pelaporan kematian dari masyarakat secara langsung dan realtime untuk meningkatkan persentase capaian akta kematian	Meningkatnya pelaporan kematian dari masyarakat secara langsung dan realtime untuk meningkatnya persentase capaian akta kematian

2.1.10 PENGHARGAAN DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

Beberapa penghargaan yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam periode Renstra 2021-2025, antara lain :

Tabel 2.13 Penghargaan Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2021-2024

NO.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Dukcapil Bisa	Menteri Dalam Negeri	2021
2.	Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2021	MenpanRB	2021
3.	Dukcapil Bisa (Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Besar – Rakornas di Bali)	Menteri Dalam Negeri	2022
4.	Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2022	MenpanRB	2022
5.	Walikota Kota Semarang sebagai Atas Dukungan dan Komitmen yang Luar Biasa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkelanjutan Tahun 2023 di Manado	Menteri Dalam Negeri	2023

2.1.11 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

Dalam mengukur adanya tantangan dan peluang. Pendekatan atau metode analisa tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Tantangan
1) Jumlah penduduk yang besar;
2) Mobilitas penduduk yang tinggi;
3) Tuntutan masyarakat akan pelayanan adminduk daring yang lebih cepat daripada pelayanan luring;
4) Kompleksitas permasalahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5) Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan;
6) Kurangnya koordinasi antar lembaga/lintas OPD terhadap administrasi kependudukan;
7) Perlunya peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam layanan administrasi kependudukan
8) Perlunya peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang berkelanjutan untuk kemajuan pembangunan daerah;
9) Kurangnya jumlah SDM setiap tahun dikarenakan purna tugas ataupun mutasi ke OPD lain;
10) Perlunya peningkatan sosialisasi dan diseminasi terkait administrasi kependudukan secara luas kepada masyarakat;

11) Perlunya pengembangan inovasi-inovasi baru yang berkelanjutan dalam pelayanan adminduk.

b. Peluang
   1) Adanya Perda tentang penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan;
   2) Adanya dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   3) Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   4) Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal;
   5) Program SIAK dan database kependudukan yang telah terintegrasi dan terpusat secara nasional;
   6) Telah terbangunnya sistem penyelenggaraan pelayanan adminduk secara online yang digunakan masyarakat;
   7) Memiliki gedung arsip untuk penyimpanan Register dan arsip permohonan Akta Catatan Sipil dapat disimpan dan dikelola dengan baik;
   8) Terdapat Unit Layanan Adminduk di 10 (sepuluh) Kecamatan untuk pelayanan yang belum dapat dilakukan secara online, seperti perekaman dan pencetakan KTP-el;
   9) Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program kependudukan dan pencatatan sipil;
   10) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan penggunaan perangkat digital dalam permohonan pelayanan administrasi kependudukan;
   11) Perkembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan;
   12) Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum;
   13) Adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya;
   14) Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi Kependudukan;
   15) Adanya pemangku kepentingan yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan;
   16) Adanya pemanfaatan data kepedudukan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tentunya masih ada permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan telah diuraikan di atas tersebut, dapat disikapi sebagai suatu tantangan dan peluang agar dapat meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Adapun Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah bahwa dinamika pembangunan daerah di Kota Semarang bergerak cepat dengan adanya perkembangan global diberbagai sektor, dampak diantaranya adalah pertumbuhan dan mobilitas penduduk Kota

Semarang yang semakin tinggi, dan tentunya memerlukan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang “Gratis, Praktis, Sistematis”.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, tidak diskriminatif memenuhi standar teknologi informasi, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan, semua perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Seiring dengan perjalanan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan penajaman melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Maka terdapat juga beberapa perubahan dalam rangka peningkatan kualitas administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyakarat. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ini, beberapa perubahan paradigma dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat antara lain :

1) Pelayanan kependudukan yang lebih efektif dan efisien melalui pengurangan birokrasi dan mempermudah proses pendaftaran di beberapa layanan. Sebelumnya, masyarakat sering dibebani persyaratan pengantar dari RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Kini, untuk beberapa layanan, penduduk hanya perlu membawa fotokopi KK untuk melakukan pendaftaran, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan kependudukan;
2) Penggunaan teknologi informasi yang dapat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kependudukan, sehingga proses pendaftaran dan pencatatan sipil dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat;
3) Peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan kependudukan, sehingga masyarakat dapat dengan aktif terlibat dalam proses pendaftaran dan pencatatan sipil;
4) Pengintegrasian data kependudukan yang mengatur tentang pengintegrasian data kependudukan, sehingga data kependudukan dapat dengan mudah diakses dan digunakan untuk keperluan pembangunan daerah Kota Semarang.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Identifikasi permasalahan merupakan tahapan penting dalam proses merumuskan isu-isu strategis. Tahapan yang sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta etika birokrasi. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan sesuai dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Identifikassi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1) Belum optimalnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal	1) Belum optimalnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna	1) Belum optimalnya pendataan penduduk
		2) Belum optimalnya perekaman identitas penduduk
		3) Belum optimalnya pendataan pindah datang penduduk
	2) Belum optimalnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	1) Belum optimalnya pencatatan kelahiran penduduk
		2) Belum optimalnya pencatatan perkawinan dan perceraian
		3) Belum optimalnya pencatatan kematian, pewarganegaraan dan perubahan status anak
	1) Belum optimalnya kualitas layanan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2) Belum optimalnya pelaporan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3) Belum optimalnya layanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1) Belum optimalnya kualitas pengelolaan sistem informasi	1) Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan

Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
	administrasi kependudukan	2) Belum optimalnya tata kelola SDM dan Teknologi Informasi Komunikasi administrasi kependudukan
		1) Belum optimalnya pengolahan dan penyajian data kependudukan
	1) Belum optimalnya perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	1) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan
		2) Belum optimalnya kerjasama adminduk
		3) Belum optimalnya inovasi pelayanan
	1) Belum optimalnya pengelolaan profil kependudukan daerah	1) Belum optimalnya pengolahan dan penyajian data kependudukan

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telahaan Dokumen RPJMN 2024-2029

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Bahwa dalam Sasaran Prioritas Nasional 6, dilakukan sebagai serangkaian intervensi pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :

a. Penguatan tata kelola dan data jaminan sosial yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
b. Penguatan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu yang didukung data kependudukan yang akurat;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat dan berkategori “Sangat Baik”;
d. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk;
e. Pemanfaatan data kependudukan secara nasional;
f. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan administrasi kependudukan.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang, serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah.

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir

periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional. Sebagaimana tersebut dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih Tahun 2025-2029 adalah :

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif"

Makna dari Visi tersebut adalah Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju menjadi pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, logistik, wisata dan bisnis yang terintegrasi. Berkeadilan sosial yaitu mengarah kepada pembangunan yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Lestari yaitu pembangunan yang menitikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman serta berorientasi untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Inklusif yaitu Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dalam melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih periode 2025-2029 dituangkan dalam Tabel 2.12 sebagai berikut :

Tabel 2.12

Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2025-2029

Visi : "Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif"
Misi

MISI 1: Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian
MISI 2: Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi
MISI 3: Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak
MISI 4: Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan ekonomi kreatif ke pasar global
MISI 5: Mewujudkan infrastruktur kota ke saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas dan koneksi antar wilayah yang berkelanjutan
MISI 6 : Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob serta dampaknya bagi masyarakat
MISI 7 : Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban dan inklusif berbasis kota cerdas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Misi yang Ke-7 (tujuh) yaitu “Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih dari korupsi, berkeadaban dan inklusif berbasis kota cerdas”.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang administrasi kependudukan, maka Sasaran RPJMD 2024-2029 yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

“Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat”**.** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam mencapai indikator “Indeks Pelayanan Publik”.

Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 2025-2029, yaitu : “Meningkatnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal”**.**

Untuk dapat mewujudkan Tujuan Renstra ini, terdapat 4 (empat) Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1) Meningkatnya kualitas layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
2) Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan;
4) Meningkatnya jangkauan pemanfaatan profil kependudukan.

c. Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun kedepan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sedangkan Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2020 – 2024 khususnya tujuan ke-2 yaitu “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan

daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi".

Selanjutnya untuk mewujudkan Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri tersebut, diwujudkan melalui Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu "Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis, meliputi:

1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfataan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).

Isu Stategis Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Administrasi Kependudukan, yaitu: Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi:

1) Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah;
2) Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri;
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan;
4) Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product, out of service, dan out of sale*.

d. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Rencana Pembangunan Daerah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Dalam menyusun Renstra Disdukcapil Kota Semarang turut memperhatikan beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 dan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah 2024 - 2026, serta RPD Provinsi tetangga yang berbatasan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-

sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di atas, permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan Pemerintahan pada Renstra sebelumnya, maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk tahun 2024-2026 yang perlu diacu dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah "Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari", dengan indikator kinerja :
   a. Pendapatan per kapita;
   b. Angka kemiskinan;
   c. Rasio gini.
2. Sasaran daerah guna mendukung pencapaian dengan tujuan daerah meliputi:
   a. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja :
      - Pertumbuhan ekonomi;
      - Inflasi;- Tingkat Pengangguran Terbuka;
      - Nilai Tukar Petani;
   b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, dengan indikator kinerja :
      - Indeks Pembangunan Manusia;
      - Indeks Pembangunan Kebudayaan;
      - Indeks Pembangunan Gender;
      - Indeks Pembangunan Keluarga;
   c. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja :
      - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
      - Indeks Risiko Bencana
   d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, dengan indikator kinerja adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan penelaahan terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah, maka pelayanan Dispermades berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung ketercapaian indikator

kinerja Daerah diarahkan untuk mendukung Tujuan : *"Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera"* pada;

1. Sasaran ke-1, yaitu "Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan" dengan tujuan perangkat daerah : Meningkatkan Desa Mandiri.
2. Sasaran ke-4, yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis" dengan tujuan perangkat daerah : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

e. Telaahan Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029. KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain:

1) Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender;
3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah;
4) Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim;
5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan
7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Dari ke 7 (tujuh) isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah, Disdukcapil Kota Semarang ada di dalam isu strategis ke-7 (tujuh) yaitu Perlunya memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab. Isu strategis tersebut dijabarkan dalam

tabel isu KLHS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagai berikut :

Tabel 2.13
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Disdukcapil Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
	3. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah
	4. Perkembangan Teknologi Informasi
	5. Peningkatan Tata Kelola Keuangan
	6. Penyelenggaraan Good Governance

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, terdapat indikator yang mendukung dan menjadi tugas dan kewenangan Disdukcapil Kota Semarang yaitu Nilai Indeks Pelayanan Publik, secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pokok Visi 4 : Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif									
MISI 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas									
Tujuan RPJMD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat									
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat									
No	Indikator	Target						Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Indeks Pelayanan Publik	4,48	4,52	4,56	4,60	4,64	4,66		a. Kebijakan pelayanan yang jelas dan tidak rumit; b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bintek; c. Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik; d. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik; e. Penguatan sistem informasi dan pengaduan.

2.2.3 Penentuan Isu-isu Strategis Disdukcapil Kota Semarang

Analisa terhadap isu-isu strategis terkait administrasi kependudukan yang relevan dengan lingkungan dinamis demografi dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 , serta yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan dalam jangka waktu menengah 2024-2029.

Perkembangan demografi di Kota Semarang cenderung fluktuatif dan meningkat. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kota Semarang tercatat 1.702.379 jiwa. Mengikuti peningkatan jumlah penduduk seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, prediksi demografi di masa depan menunjukkan bahwa Kota Semarang kemungkinan akan mengalami perubahan signifikan dalam struktur penduduknya. Komposisi penduduk memiliki proporsi usia produktif yang cenderung dominan selama 10 tahun terakhir dengan rasio jenis kelamin yang cukup seimbang. Kota Semarang juga diprediksi turut mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tren ini antara lain adalah urbanisasi, kebijakan ekonomi, dan perubahan sosial. Disdukcapil menangkap hal ini agar dapat selalu beradaptasi dan melakukan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan perkembangan teknologi informasi.

Adapun analisa isu strategis yang relevan dengan potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS, isu lingkungan dinamis meliputi isu global, isu nasional dan isu regional, serta isu strategis perangkat daerah, selengkapnya sebagaimana, sebagai berikut :

Tabel 2.15
Isu-isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Adanya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	• Belum optimalnya kualitas layanan administrasi kependudukan	• Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	• Dampak Pandemi Covid-19 secara global telah mempengaruhi pelayanan administrasi kependudukan di berbagai negara sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan peningkatan kualitas layanan dan mencegah kesenjangan	• Perlunya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat	• Besarnya jumlah penduduk Kota Semarang menyebabkan permasalahan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih kompleks sehingga memerlukan penanganan yang tepat	• Belum optimalnya layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipi
• Adanya Perda tentang penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan	• Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	• Perkembangan teknologi informasi	• Migrasi penduduk yang disebabkan oleh perubahan iklim, misalnya banjir, kekeringan, tanah longsor, permukiman yang terkena rob, dll	• Masih adanya keterbatasan akses karena masih banyaknya warga negara yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan karena berbagai alasan seperti	• Pelayanan administrasi kependudukan yang masih lambat dan birokratis, belum sesuai dengan harapan masyarakat	• Belum optimalnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				lokasi geografis, biaya dan kurangnya informasi.		
● Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	● Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan	● Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan keuangan Pemerintah	● Krisis pengungsi di daerah konflik menyebabkan warga/pengungsi daerah konflik menjadi tidak mempunyai dokumen kependudukan	● Urbanisasi yang cepat menyebabkan ketimpangan data antara wilayah perkotaan dan pedesaan	● Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan/atau peristiwa penting	● Belum optimalnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
● Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal	● Perlu ditingkatkanya ketertiban administrasi kependudukan di Kota Semarang	● Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis	● Peningkatan arus migrasi antar negara (pengungsi, pencari suaka, tenaga kerja)	● Penerapan Idenitas Kependudukan Digital secara nasional	● Belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	● Belum optimalnya kualitas pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan
● Terdapat Unit Layanan Adminduk di 10 (sepuluh) Kecamatan untuk pelayanan yang belum dapat dilakukan secara online, seperti perekaman dan	● Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi		● Orang tanpa kewarganegaraan akan mengalami kesulitan mengakses hak dasar	● Pemanfaatan data kependudukan untuk pemberian jaminan sosial	● Perlunya penguatan tata kelola pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan	● Belum optimalnya perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
pencetakan KTP-el						
• Telah terbangunnya sistem penyelenggaraan pelayanan adminduk secara online yang digunakan masyarakat	• Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan lintas sektor untuk pembangunan daerah	• Penyelenggaraan Good Governance	• Perubahan demografi dengan penuaan populasi di negara maju dan ledakan pemuda di negara berkembang	• Integrasi dan pemutakhiran data kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati	• Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan lintas sektor untuk pembangunan daerah	• Belum optimalnya pengelolaan profil kependudukan daerah

2.3 PENELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada dasarnya adalah instrumen tata ruang, tetapi implikasinya sangat erat dengan kependudukan karena: Wiilayah administrasi yang diatur meliputi 16 kecamatan di Kota Semarang dengan luas ±39.923 hektar. Hal ini menjadi dasar perencanaan sebaran penduduk, layanan publik, dan infrastruktur. Pengembangan pusat pelayanan kota, sub pusat, dan pusat lingkungan diatur untuk menyesuaikan dengan sebaran dan pertumbuhan penduduk. Ini penting karena jumlah penduduk dan migrasi (urbanisasi) menuntut distribusi ruang yang adil. Kawasan strategis sosial budaya disebut dalam kebijakan penataan ruang. Kawasan ini erat kaitannya dengan layanan kependudukan, seperti pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Dengan demikian RTRW mempengaruhi antara lain distribusi hunian dan permukiman yaitu dengan menentukan kebutuhan data kependudukan yang akurat untuk mengantisipasi kepadatan. Mempermudah akses pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial) dengan data pencatatan sipil yang valid agar tepat sasaran. Mobilitas penduduk (urbanisasi) yang akan berimplikasi pada penyediaan infrastruktur dan layanan administrasi kependudukan di pusat pertumbuhan.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkaitan dengan RTRW mengatur fungsi pusat pelayanan kota dan unit pelayanan yang ada di 10 Kecamatan yang mencakup pelayanan administrasi kependudukan yang penting untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK, akta lahir/kematian, dll). Pertumbuhan penduduk perkotaan mempengaruhi perubahan tata ruang memicu tumbuhnya kawasan baru (permukiman, industri, pendidikan), yang harus diimbangi dengan keberadaan unit layanan pencatatan sipil di kecamatan/kelurahan. Integrasi data kependudukan berkaitan dengan RTRW menekankan pentingnya sistem informasi dan jaringan telekomunikasi. Ini bisa mendukung digitalisasi layanan pencatatan sipil agar lebih cepat, mudah, dan menjangkau warga di kawasan baru.

Proyeksi penduduk berdasarkan RTRW harus mengacu pada proyeksi jumlah dan sebaran penduduk Semarang hingga 2030 untuk mencegah ketidakseimbangan antara daya dukung ruang dan kebutuhan masyarakat. Kawasan permukiman baru yang terbentuk memerlukan layanan administrasi kependudukan berbasis wilayah, termasuk kantor kelurahan/kecamatan yang representatif. Urbanisasi dan migrasi harus diantisipasi dengan sistem pencatatan sipil yang adaptif agar penduduk pendatang tidak terabaikan dalam layanan dasar. Integrasi perencanaan ruang dengan data kependudukan antara Bappeda dan Disdukcapil perlu bersinergi agar kebijakan pembangunan (perumahan, pendidikan, kesehatan) benar-benar sesuai dengan data demografi. Kawasan strategis sosial budaya dapat diperkuat sebagai titik layanan publik, termasuk layanan kependudukan (misalnya mal pelayanan publik, dan pelayanan adminduk online).

Terdapat beberapa rekomendasi terkait RTRW yang berkaitan dengan isu kependudukan antara lain

a. pemetaan spasial data kependudukan: mengintegrasikan RTRW dengan data kependudukan *by-name by-address* (BNBA) dari Disdukcapil.
b. Distribusi unit layanan pencatatan sipil untuk memastikan ketersediaan layanan yang dekat dengan pusat pertumbuhan baru.
c. Digitalisasi layanan: pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang diatur dalam RTRW untuk layanan kependudukan online.
d. Kolaborasi lintas sektor antara Bappeda (perencanaan ruang) dengan Disdukcapil (penyedia data kependudukan) yang digunakan OPD lain seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan (layanan publik) agar kebijakan tata ruang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

2.4 PENELAAHAN TERHADAP P3MKM (Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat)

2.4.1 Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

PUG adalah singkatan dari Pengarusutamaan Gender, yaitu strategi pembangunan yang memastikan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender ke dalam segala tahapan kebijakan dan program pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuannya adalah memberikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender diterapkan melalui identifikasi isu dan kesenjangan gender dalam layanan administrasi kependudukan. Terdapat 7 indikator / isu PUG antara lain akses, partisipasi, kontrol, manfaat, subordinasi dan double bourden, serta marginalisasi dan budaya.

Pada tahun Pemerintah Kota Semarang telah meraih penghargaan tertinggi untuk PUG yaitu Anugerah Parahita Ekapraya dengan predikat Mentor yaitu predikat tertinggi pada Tahun 2023 di tingkat nasional.

Disdukcapil senantiasa mendukung capaian PUG dan meraih isu PUG dan ARG yang terkait dengan urusan administrasi kependudukan. Isu / indikator PUG tersebut antara lain :

a. Isu Akses: Perempuan, difabel, lansia, dan warga miskin menghadapi kesulitan akses layanan karena jarak, waktu, atau keterbatasan teknologi.
b. Isu Partisipasi: Partisipasi perempuan dalam mengurus dokumen adminduk lebih rendah dibanding laki-laki; warga miskin dan miskin ekstrem sering menunda atau enggan mengurus dokumen.
c. Isu Kontrol: Belum optimalnya kontrol pemerintah dalam memastikan layanan aktif menjangkau semua kelompok, terutama yang rentan.
d. Isu Manfaat: Banyak masyarakat belum memahami pentingnya dokumen adminduk terbaru (KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian).
e. Subordinasi & Double Burden: Perempuan dan warga miskin lebih terbebani oleh waktu dan biaya, sehingga pelayanan harus proaktif.
f. Marginalisasi & Budaya: Masih ada anggapan bahwa mengurus dokumen adminduk itu rumit, mahal, dan bisa ditunda.

Pelaksanaan PUG dan ARG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah dilakukan internalisasi dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, antara lain dengan kegiatan :

1. Pelayanan jemput bola (stelsel aktif), khusus untuk kelompok rentan: difabel, lansia, warga miskin;
2. Pelayanan keliling di kelurahan dengan kantong kemiskinan;
3. Fasilitasi pencatatan kependudukan untuk warga miskin ekstrem (termasuk program P3KE);
4. Kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk layanan khusus (misalnya penerbitan KK/KTP-el bagi pasangan bercerai);
5. Fasilitasi penerbitan akta kelahiran anak secara cepat agar hak identitas anak terlindungi, terutama anak perempuan;
6. Layanan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan sosialisasi aspek perlindungan hak perempuan dan anak;
7. Sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan (KIA, KK, akta lahir, akta kematian) dengan menekankan manfaat bagi perempuan (misalnya akses bantuan sosial, kesehatan, pendidikan);
8. Pelatihan pegawai tentang perspektif gender dan pelayanan inklusif;
9. Pembentukan focal point/pejabat penggerak PUG di internal Disdukcapil;
10. Penerapan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* dalam penyusunan program/kegiatan;
11. Monitoring capaian layanan administrasi kependudukan berbasis data terpilah gender;
12. Evaluasi dampak layanan terhadap peningkatan akses dan partisipasi perempuan, laki-laki, anak, lansia, dan disabilitas.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah adalah pendekatan dalam penyusunan anggaran pemerintah yang memperhatikan kebutuhan, pengalaman, peran, dan aspirasi berbeda antara laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. ARG diterapkan melalui Gender Budget Statement (GBS) dalam program/kegiatan yang dilaksanakan Disdukcapil Kota Semarang, yaitu pada Program Pendaftaran Penduduk meliputi pelayanan penerbitan KTP-el, KK, KIA dan Program Pencatatan Sipil yang meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan,akta perceraian dan akta perubahan status anak.

Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam 2 Program Prioritas Reponsif Gender tersebut dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.16 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berkaitan dengan PUG dan ARG
Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			KETERANGAN GENDER
			Kode Rekening	Nomenklatur	Indikator Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang					
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk	Memfasilitasi penerbitan dokumen adminduk bagi penduduk non permanen dan penduduk rentan adminduk
2			2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Menyelenggarakan pelayanan pendafataran penduduk di Dinas dan 15 TPDK Kecamatan
3			2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Menyelenggarakan penatausahaan dan penerbitan dokumen adminduk dan pelaporan peristiwa kependudukan di Dinas dan 15 TPDK Kecamatan
5		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Menyelenggarakan pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			KETERANGAN GENDER
			Kode Rekening	Nomenklatur	Indikator Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7
6		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting	Menyelanggarakan pelayanan keliling secara aktif ke Kelurahan, Kecamatan, rumah-rumah warga difabel dan lansia
7			2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Memfasilitasi penerbitan dokumen pendaftaran penduduk bagi Yayasan, pelayanan keliling, Panti Asuhan
9		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Menyelenggarakan monev terkait pendaftaran penduduk di Dinas dan 16 TPDK Kecamatan
10	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah laporan hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Menyelenggarakan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
11			2.12.03.2.01.02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil di Dinas dan 16 TPDK Kecamatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			KETERANGAN GENDER
			Kode Rekening	Nomenklatur	Indikator Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7
13		Kegiatan Penataan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Menyelenggarakan pengadaan formulir dan buku terkait pencatatan sipil untuk pelayanan
14		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting	Menyelenggarakan pelayanan keliling ke Kelurahan, rumah warga difabel, lansia, yayasan
15			2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Memfasilitasi pengurusan dokumen akta kelahiran bagi warga yang sudah berusia 50 tahun ke atas
16		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Menyelenggarakan monev terkait pencatatan sipil di Dinas dan 15 TPDK Kecamatan
17	Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten / Kota dalam penerbitan pengelolaan pnformasi administrasi kependudukan	Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga eksternal terkait penerbitan dokumen adminduk

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			KETERANGAN GENDER
			Kode Rekening	Nomenklatur	Indikator Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7
18			2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Menyelenggarakan sosialisasi terkait administrasi kependudukan di 16 Kecamatan
20		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Menyelenggarakan monev terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Dinas dan 15 TPDK Kecamatan

2.4.2 Kota Layak Anak pada Urusan Administrasi Kependudukan

Program Kota Layak Anak menuntut adanya pemenuhan hak-hak anak, salah satunya hak identitas hukum. Hal ini langsung bersinggungan dengan tugas Disdukcapil, yaitu memberikan dokumen kependudukan kepada setiap anak sejak lahir. Tanpa dokumen kependudukan (akta kelahiran, KIA, KK), anak akan kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum.

Dalam rangka mendukung Pemkot Semarang yang pada tahun 2025 telah mencapai penghargaan Kota Layak Anak dengan predikat utama yaitu penghargaan tertinggi dalam level tertinggi dalam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian PPPA RI. Beberapa langkah yang telah dilakukan Disdukcapil Kota Semarang dalam memberikan hak anak dalam urusan administrasi kependudukan tersebut antara lain :

a. Penerbitan akta kelahiran gratis & mudah, dengan menerapkan layanan jemput bola akta lahir di rumah sakit, puskesmas, dan bidan (integrasi layanan kelahiran).
b. Kartu Identitas Anak (KIA), dengan meningkatkan kepemilikan KIA sebagai identitas resmi anak. Pemanfaatan KIA untuk akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik ramah anak.
c. Inovasi layanan ramah anak & kelompok rentan, loket ramah anak di kantor Disdukcapil. Penyediaan ruang bermain anak saat orang tua mengurus dokumen. Sistem layanan online dan offline yang mudah dijangkau keluarga miskin dan ibu rumah tangga.
d. Integrasi data anak dengan program perlindungan, pemanfaatan data kependudukan anak untuk program stunting, bantuan sosial, dan perlindungan anak dari kekerasan serta dukungan database anak terlantar/anak berhadapan dengan hukum untuk intervensi Dinas terkait.

Manfaat Penerapan / implementasi Kota Layak Anak dalam urusan administrasi kependudukan antara lain :

a. Bagi anak, terjamin hak sipil, akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.
b. Bagi Pemerintah Kota Semarang, penguatan capaian indikator KLA terutama *Klaster 1: Hak Sipil & Kebebasan Anak*.
c. Bagi masyarakat, kemudahan layanan identitas anak, peningkatan kesadaran pentingnya dokumen kependudukan sejak dini.

Dalam pelaksanaan Kota Layak Anak ini terdapat beberapa tantangan, antara lain :

a. Masih ada anak yang belum tercatat akta lahir karena faktor ekonomi, pernikahan tidak tercatat, atau keterbatasan akses layanan.
b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya KIA.
c. Keterbatasan SDM dan sarana untuk layanan ramah anak di Unit Layanan administrasi kependudukan tingkat Kecamatan.

Rencana aksi dan tindak lanjut yang telah dan akan terus dilakukan Disdukcapil Kota Semarang selama masa Renstra 2025-2029 mendapatang antara lain :

a. Perluasan *jemput bola* akta lahir dan KIA ke sekolah-sekolah, puskesmas, serta kelurahan.
b. Optimalisasi sistem digital terintegrasi RS - Dukcapil untuk akta kelahiran.
c. Peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya dokumen identitas anak melalui sosialisasi KIA ke siswa SMP se-Kota Semarang (KIA Goes To School).
d. Penyediaan sarana prasarana layanan ramah anak di seluruh unit layanan Disdukcapil.
e. Penguatan data terpilah anak (gender, disabilitas, usia) sebagai basis program perlindungan anak di Kota Semarang.

2.4.3 GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) Terkait Administrasi Kependudukan

Dalam Peraturan Wali Kota Semarang (Perwal) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045. Yang bertujuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan berbagai aspek kependudukan agar pertumbuhan penduduk berjalan seimbang, kualitas penduduk meningkat, mobilitas dan persebaran terkelola, pemberdayaan keluarga, dan administrasi kependudukan yang rapi dan terintegrasi.

Menurut Perwal GDPK tersebut, mencakup 5 (lima) pilar utama sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.17 Pilar Utama GDPK

No	Pilar	Penjelasan Singkat
1	Pengendalian Kuantitas Penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung daerah.
2	Peningkatan Kualitas Penduduk	Meliputi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kompetensi dan daya saing.
3	Pembangunan Keluarga	Memperkuat keluaga berketahanan, kesejahteraan, kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera.
4	Penataan Persebaran & Pengarahan Mobilitas Penduduk	Mengatur dimana penduduk tinggal, migrasi internal, urbanisasi, distribusi antar wilayah agar seimbang.

No	Pilar	Penjelasan Singkat
5	Penataan Administrasi Kependudukan	Data kependudukan yang valid, sistem informasi administrasi kependudukan, dokumen identitas, pencatatan vital (lahir, mati, dsb).

Sebagaimana tabel tersebut diatas Disdukcapil Kota Semarang turut mendukung GDPK dalam hal Penataan Administrasi Kependudukan yaitu menyediakan data kependudukan yang valid, sistem administrasi kependudukan, dokumen identitas, pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Tantangan dalam pelaksanaan GDPK dalam hal penataan administrasi kependudukan, antara lain :

a. Ketidakseimbangan antar wilayah kelurahan
   Beberapa wilayah pinggiran atau padat mungkin masih kesulitan mengakses atau administrasi kependudukan secara cepat untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pelayanan adminduk secara online / daring. Saat ini Disdukcapil Kota Semarang telah memiliki aplikasi adminduk online SiDenOK.
b. Data & validitas administrasi kependudukan
   Masih perlu peningkatan integrasi sistem data, kecepatan dalam pencatatan kelahiran/mati, migrasi internal, dan update kependudukan sehingga data selalu mutakhir.
c. Mobilitas dan persebaran penduduk
   Urbanisasi atau migrasi masuk bisa menimbulkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik jika tidak diantisipasi dengan baik.
d. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat
   Kesadaran masyarakat pentingnya pencatatan administrasi kependudukan masih perlu diperkuat.
e. Pendanaan dan sumber daya manusia
   Program seperti pelayanan adminduk keliling, perekaman KTP-el difabel dan lansia, kerjasama percepatan akta kelahiran dengan Rumah Sakit, Puskesmas masih perlu dukungan dalam hal anggaran dan SDM pelaksana.

Strategi dan peran yang dapat dilakukan Disdukcapil Kota Semarang untuk mendukung GDPK antara lain :

a. Perluasan layanan administrasi kependudukan berupa pelayanan adminduk secara online melalui aplikasi SiDenOK yang dapat diakses seluruh penduduk Kota Semarang dimanapun berada.
b. Kerjasama percepatan penerbitan akta kelahiran dengan Rumah Sakit, Bidang, Puskesmas.
c. Pelaporan akta kematian yang dapat dilakukan secara realtime oleh Ketua RT apabila ada warganya meninggal dapat melaporkan ke E-Pakem (Elektronik Pelaporan Kematian).
d. Memperluas sosialisasi dan diseminasi administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui sosialisasi secara langsung, melalui media cetak maupun media elektronik.

2.4.4 P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan Stunting

a. P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dirancang Pemerintah untuk memastikan intervensi sosial dan ekonomi tepat sasaran. Data P3KE menggunakan pendekatan *by name by address* sehingga keakuratan data kependudukan menjadi krusial. Dalam praktiknya, masalah administrasi kependudukan (adminduk) seringkali menjadi penghambat utama bagi warga miskin ekstrem dalam mengakses bantuan pemerintah.

Disdukcapil Kota Semarang sebagai OPD penyedia data kependudukan turut berperan aktif dalam memfasilitasi verifikasi, validasi data penduduk yang ada dalam database penduduk miskin dan miskin ekstrem. Selain itu Disdukcapil Kota Semarang juga memberikan fasilitasi berupa penerbitan dokumen administrasi kependudukan kepada warga miskin dan miskin ekstrem dengan datang langsung ke rumah warga miskin dan miskin ekstrem untuk membantu pengurusan dokumen adminduknya, hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh warga miskin dan miskin ekstrem tersebut.

Permasalahan utama yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan P3KE administrasi kependudukan adalah data kependudukan yang tidak sinkron, warga miskin / miskin ekstrem tidak memiliki dokumen dasar, warga sering kali berpindah tempat tinggal sehingga sulit untuk dilakukan intevensi secara langsung, data kependudukan warga miskin / miskin ekstrem antar OPD belum terintegrasi.

Strategi dan peran Disdukcapil Kota Semarang terkait kegiatan P3KE ini antara lain :

a. Integrasi pemanfaatan data kependudukan warga miskin / miskin ekstrem dapat diakses oleh Dinas Sosial secara realtime.
b. Melakukan *cross-check* berkala antara data P3KE, DTKS, dan data kependudukan agar selalu mutakhir.
c. Dukcapil bersama OPD terkait turun langsung ke kelurahan dan lingkungan kantong kemiskinan ekstrem untuk perekaman KTP, penerbitan KK, akta kelahiran dan akta kematian.
d. Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor antar OPD yang terkait langsung dengan P3KE ini, khususnya Disdukcapil Kota Semarang sebagai penyedia data.

b. Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berhubungan erat dengan kualitas hidup generasi mendatang. Salah satu tantangan besar dalam percepatan penurunan stunting di Kota Semarang adalah validitas dan keterpaduan data sasaran. Data anak balita, ibu hamil, dan keluarga

berisiko stunting harus tepat dan akurat agar intervensi kesehatan dan sosial berjalan efektif.

Di sinilah peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi strategis. Administrasi kependudukan yang tertib—melalui kepemilikan Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, dan Akta Kelahiran—menjadi dasar dalam menyusun *by name by address* sasaran keluarga berisiko stunting, sekaligus memastikan mereka memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta program bantuan sosial.

Permasalahan utama dalam penanganan stunting dalam urusan administrasi kependudukan adalah ketiadaan dokumen kelahiran anak, ketidakakuratan data keluarga, keluarga balita stunting seringkali berpindah tempat tinggal yang dapat mempersulit intervensi stunting, kurang integrasi data kependudukan terkait balita penderita stunting.

Strategi dan peran Disdukcapil Kota Semarang dalam penanganan stunting, antara lain :

a. Pendataan proaktif dan jemput bola yaitu Disdukcapil melaksanakan layanan langsung ke rumah warga / balita penderita stunting untuk memastikan anak telah memiliki akta kelahiran, KIA dan telah masuk dalam KK.
b. Integrasi sistem data yaitu menghubungkan data kependudukan dengan data kesehatan (Dinkes) dan data sosial (Dinsos) dalam satu basis terpadu.
c. Fasilitasi dan penyederhanaan proses alur pengurusan dokumen administrasi kependudukan bagi keluarga miskin berisiko stunting, termasuk layanan gratis tanpa biaya tambahan.

Keberhasilan penanganan Stunting di Kota Semarang sangat ditentukan oleh ketertiban administrasi kependudukan. Disdukcapil Kota Semarang berperan sentral dalam memastikan setiap anak tercatat sejak lahir, setiap keluarga memiliki data kependudukan yang valid, dan seluruh sasaran dapat diintervensi secara tepat. Dengan demikian, sinergi antara Disdukcapil, Dinkes, Dinsos, Bappeda dan perangkat kelurahan menjadi kunci percepatan penurunan stunting menuju Semarang Sehat dan Bebas Stunting.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang, berpedoman pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2024-2029 visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DISDUKCAPIL

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Disdukcapil Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang administrasi kependudukan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Dampak tersebut harus menjadi tujuan akhir dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan pada Disdukcapil Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Disdukcapil Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan Perangkat Daerah Disdukcapil Kota Semarang :

“Meningkatnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal”.

Tujuan perangkat daerah ini memiliki Indikator Tujuan, yaitu :

1. “Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”. Indikator ini memiliki definisi operasional dihitung dari Rata-rata beberapa capaian sebagai berikut :

1) Persentase Perekaman KTP-el;

2) Persentase Kepemilikan KIA;

3) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga;

4) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun;

5) Persentase Kepemilikan Akta Kematian;

2. "Tingkat kinerja pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan". Indikator ini memiliki definisi operasional dihitung dari :

   (Jumlah tempat layanan yang memiliki SIAK yang dikelola / Jumlah seluruh tempat layanan adminduk yang memiliki SIAK X 100%) + (Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama / Jumlah OPD yang telah memiliki perjanjian kerjasama X 100%)/2

Sasaran Perangkat Daerah Disdukcapil Kota Semarang :

1. Meningkatnya kualitas layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan;
4. Meningkatnya jangkauan pemanfaatan profil kependudukan.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator dari tujuan dan sasaran dalam periode Renstra 2025-2030 diperinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU-AN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**T.** Meningkatnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal		1. "Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil" * Dengan definisi operasional sebagai berikut : ((Jumlah penduduk ber KTP/Jumlah penduduk wajib KTP x 100%) + (Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK/Jumlah kepala keluarga x100%) + (Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahunx100%) + (Jumlah Akta kematian yang diterbitkan/Jumlah kematian penduduk di di tahun nx100%) + (Jumlah KIA yang diterbitkan / jumlah anak usia -17 tahun yang kurang 1 hari x100%)) / 5. Merupakan rata-rata dari beberapa capaian :	Persen (%)	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	
			a. Persentase Perekaman KTP-el	Persen (%)	99,37	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	
			b. Persentase Kepemilikan KIA	Persen (%)	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	
			c. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
			d. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen (%)	98,40	98,50	98,60	98,70	98,80	98,90	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU-AN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			e. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
			2. ”Tingkat kinerja pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan” * Dengan definisi operasional sebagai berikut : (Jumlah tempat layanan yang memiliki SIAK yang dikelola / Jumlah seluruh tempat layanan adminduk yang memiliki SIAK X 100%) + (Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama / Jumlah OPD yang telah memiliki perjanjian kerjasama X 100%)/2	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
		S.1 Meningkatnya kualitas layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Angka	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	
		S.2 Meningkatnya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	
			2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Angka	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU-AN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		S.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan	1. Tingkat efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan * Definisi operasional : (Jumlah tempat layanan yang memiliki SIAK yang dikelola / Jumlah seluruh tempat layanan adminduk yang memiliki SIAK X 100%) + (Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama / Jumlah OPD yang telah memiliki perjanjian kerjasama X 100%)/2	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
		S.4 Meningkatnya jangkauan pemanfaatan profil kependudukan	1. Persentase peningkatan pemanfaatan profil kependudukan * Definisi Operasional : Jumlah profil kependudukan dimanfaatkan / Jumlah seluruh profil kependudukan yang disusun x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	

3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Disdukcapil Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dari ke 4 (empat) sasaran yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, terdapat 6 (enam) strategi, antara lain :

Sasaran dan Strategi Perangkat Daerah Disdukcapil Kota Semarang :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

Strategi : STR1. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk

STR2. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Strategi : STR3. Peningkatan layanan penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan

Strategi : STR4. Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan

STR5. Peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

Sasaran 4. Meningkatnya jangkauan pemanfaatan profil kependudukan

Strategi : STR6. Peningkatan jangkauan pemanfaatan profil kependudukan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Disdukcapil Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan

yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Disdukcapil Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP 2 2027	TAHAP 3 2028	TAHAP 4 2029	TAHAP 5 2030
STR.1 Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	**STR.1** Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	**STR.1** Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	**STR.1** Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	**STR.1** Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk
STR.2 Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil	**STR.2** Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil	**STR.2** Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil	**STR.2** Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil	**STR.2** Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil
STR.3 Peningkatan layanan penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**STR.3** Peningkatan layanan penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**STR.3** Peningkatan layanan penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**STR.3** Peningkatan layanan penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**STR.3** Peningkatan layanan penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
STR.4 Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	**STR.4** Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	**STR.4** Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	**STR.4** Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	**STR.4** Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan
STR.5 Peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	**STR.5** Peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	**STR.5** Peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	**STR.5** Peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	**STR.5** Peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

TAHAP I 2026	TAHAP 2 2027	TAHAP 3 2028	TAHAP 4 2029	TAHAP 5 2030
STR.6 Peningkatan jangkauan pemanfaatan profil kependudukan	**STR.6** Peningkatan jangkauan pemanfaatan profil kependudukan	**STR.6** Peningkatan jangkauan pemanfaatan profil kependudukan	**STR.6** Peningkatan jangkauan pemanfaatan profil kependudukan	**STR.6** Peningkatan jangkauan pemanfaatan profil kependudukan

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Disdukcapil Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Disdukcapil Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap.

Disdukcapil Kota Semarang memiliki 16 (enam belas) arah kebijakan dari 6 (enam) strategi guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, antara lain sebagai berikut :

Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Disdukcapil Kota Semarang :

Strategi 1 : STR.1 Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk

Arah kebijakan : AK1. Peningkatan pelayanan pendataan penduduk

AK2. Peningkatan perekaman identitas penduduk

AK3. Peningkatan pendataan pindah datang penduduk

Strategi 2 : STR.2 Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil

Arah kebijakan : AK4. Peningkatan pencatatan kelahiran penduduk

AK5. Peningkatan pencatatan kematian, pewarganegaraan dan perubahan status anak

AK6. Peningkatan pencatatan perkawinan dan perceraian

Strategi 3 : STR.3 Peningkatan layanan penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arah kebijakan : AK7. Peningkatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

AK8. Peningkatan pelaporan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

AK9. Peningkatan layanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Strategi 4 : STR.4 Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan

Arah kebijakan : AK10. Peningkatan pengolahan dan penyajian data kependudukan

AK11. Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan

AK12. Peningkatan tata kelola SDM dan Teknologi Informasi Komunikasi administrasi kependudukan

Strategi 5 : STR.5 Peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

Arah kebijakan : AK13. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan

AK14. Peningkatan kerjasama terkait urusan administrasi kependudukan

AK15. Peningkatan inovasi pelayanan

Strategi 6 : STR.6 Peningkatan jangkauan pemanfaatan profil kependudukan

Arah kebijakan : AK16. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Disdukcapil Kota Semarang.

Tabel 3.1.

Arah Kebijakan Disdukcapil Kota Semarang

Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah	1) Peningkatan pelayanan pendataan penduduk	
			2) Peningkatan perekaman identitas penduduk	
			3) Peningkatan pendataan pindah datang penduduk	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
			4) Peningkatan pencatatan kelahiran penduduk	
			5) Peningkatan pencatatan kematian, pewarganegaraan dan perubahan status anak	
			6) Peningkatan pencatatan perkawinan dan perceraian	
			7) Peningkatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			8) Peningkatan pelaporan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			9) Peningkatan layanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			10) Peningkatan pengolahan dan penyajian data kependudukan	
			11) Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	
			12) Peningkatan tata kelola SDM dan Teknologi Informasi Komunikasi administrasi kependudukan	
			13) Peningkatan pemanfaatan data kependudukan	
			14) Peningkatan kerjasama terkait urusan administrasi kependudukan	
			15) Peningkatan inovasi pelayanan	
			16) Peningkatan pengolahan dan penyajian data kependudukan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang, dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Disdukcapil Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Disdukcapil Kota Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	T. Meningkatnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal								
		S.1 Meningkatnya kualitas layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	STR. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	a. Peningkatan pelayanan pendataan penduduk	Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna		*Persentase perekaman KTP elektronik*	*02.12.02 PROGRAM PENDAFTA-RAN PENDUDUK*	*Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk*
						Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sub Kor Pendataan Penduduk
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Sub Kor Pendataan Penduduk
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas	Sub Kor Pendataan Penduduk

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							n dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	pendaftaran penduduk	
							Jumlah laporan permasalahan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Sub Kor Pendataan Penduduk
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Sub Kor Pendataan Penduduk
							Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Sub Kor Pendataan Penduduk
				b.Peningkatan perekaman		Cakupan perekaman	Persentase penataan	2.12.02.2.02 Penataan	Sub Kor Identitas Penduduk

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				identitas penduduk		identitas penduduk	pendaftaran penduduk	Pendaftaran Penduduk	
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2.12.02.2.02.000 Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Sub Kor Identitas Penduduk
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2.12.02.2.02.0002Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Sub Kor Identitas Penduduk
							Persentase Kepemilikan KIA	*2.12.02 PROGRAM PENDAFTA-RAN PENDUDUK*	*Kepala Bidang Pendafta-ran Penduduk*

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						Meningkatnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sub Kor Identitas Penduduk
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0002 Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa terkait pendaftaran penduduk	Sub Kor Identitas Penduduk
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03.0003Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Sub Kor Identitas Penduduk
				c.Peningkatan pendataan pindah datang penduduk		Meningkatnya penyelenggaraan pindah datang penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk	Subkor Pindah Datang Penduduk

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0005Sosialisasi pendaftaran penduduk	Subkor Pindah Datang Penduduk
							Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0006Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Subkor Pindah Datang Penduduk
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran pendudul	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran pendudul	2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Sub Kor Pindah Datang Penduduk
							Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.04.0002Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Sub Kor Pindah Datang Penduduk
							Jumlah laporan bimbingan teknis terkait	2.12.02.2.04.0003Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Sub Kor Pindah Datang Penduduk

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							pendaftaran penduduk		
			STR.2 Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil		Meningkatnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif		*Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun*	*02.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL*	*Kepala Bidang Pencatatan Sipil*
				a. Peningkatan pencatatan kelahiran penduduk		Meningkatnya penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub Kor Kelahiran
							Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	2.12.03.2.01.0001Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Sub Kor Kelahiran
							Jumlah Laporan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	2.12.03.2.01.0002Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Sub Kor Kelahiran
							Jumlah Dokumen Tata	2.12.03.2.01.0004Penyusunan	Sub Kor Kelahiran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatam Sipil	tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	
							Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	2.12.03.2.01.0005Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Sub Kor Kelahiran
							Persentase kepemilikan akta kematian	2.12.03 *PROGRAM PENCATATAN SIPIL*	*Kepala Bidang Pencatatan Sipil*
				b. Peningkatan pencatatan kematian, pewarganegaraan dan perubahan status anak		Meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 Penyelengga-raan Pencatatan Sipil	Subkor Kematian, Pewarganegaraan dan Perubahan Status Anak

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0004Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Subkor Kematian, Pewarganegaraan dan Perubahan Status Anak
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Subkor Kematian, Pewarganegaraan dan Perubahan Status Anak
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.07 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kepedndudukan terkait Pencatatan Sipil	Subkor Kematian, Pewarganegaraan dan Perubahan Status Anak
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.08 Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Subkor Kematian, Pewarganegaraan dan Perubahan Status Anak

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.09 Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Subkor Kematian, Pewarganegaraan dan Perubahan Status Anak
				c.Peningkatan pencatatan perkawinan dan perceraian		Meningkatnya pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil	2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil	Subkor Perkawinan dan Perceraian
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	2.12.03.2.03.0002Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Subkor Perkawinan dan Perceraian
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.04 Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Subkor Perkawinan dan Perceraian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		S.2 Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	STR.3 Peningkatan layanan penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Meningkatnya kualitas layanan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		*Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkualitas*	*2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*	*Sekretaris Dinas*
				a. Peningkatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkor Perencanaan dan Evaluasi
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD), RSO dan RTP	2.12.01.2.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkor Perencanaan dan Evaluasi
							Jumlah dokumen RKA SKPD	2.12.01.2.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Subkor Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.12.01.2.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Subkor Perencanaan dan Evaluasi
							Jumlah Dokumen DPA SKPD	2.12.01.2.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Subkor Perencanaan dan Evaluasi
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	2.12.01.2.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Subkor Perencanaan dan Evaluasi
							Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.12.01.2.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkor Perencanaan dan Evaluasi
							Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi kinerja SKPD	2.12.01.2.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkor Perencanaan dan Evaluasi
							Jumlah dokumen Penyelenggara	2.12.01.2.01.0008Penyelenggaraan Walidata	Subkor Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
							Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*	*Sekretaris Dinas*
				b. Peningkatan pelaporan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Bag Keuangan dan Aset
							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.12.01.2.02.0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bag Keuangan dan Aset
							Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi	2.12.01.2.02.0002Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Bag Keuangan dan Aset

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Pelaksanaan Tugas ASN		
							Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.12.01.2.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Bag Keuangan dan Aset
							Jumlah laporan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.12.01.2.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Bag Keuangan dan Aset
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.12.01.2.02.0008Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Bag Keuangan
				c. Peningkatan layanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.02.01.2.05.0002Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2.12.01.2.05.0010Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
						Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.12.01.2.06.0003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.12.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.12.01.2.06.0008Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.12.01.2.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.12.01.2.06.0010Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	2.12.01.2.06.0011Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	
						Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.12.01.2.07.0002Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Mebel yang Diadakan	2.12.01.2.07.0005Pengadaan Mebel	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0006Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
						Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.12.01.2.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.08.0004Penyediaan Jasa pelayanan Umum	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
						Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	2.12.01.2.09.0002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Pajak dan Perizinannya	Operasional atau Lapangan	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.12.01.2.09.0005Pemeliharaan Mebel	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.12.01.2.09.0006Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.12.01.2.09.0009Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.12.01.2.09.0011Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
		S.3 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan	STR.4 Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan		Meningkatnya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan		*Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan*	*02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDU-KAN*	*Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu-kan*

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				a.Peningkatan pengolahan dan penyajian data kependudu-kan		Meningkatnya dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Subkor Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2.12.04.2.01.0001Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Subkor Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04.2.01.0002Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Subkor Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
				b.Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan		Meningkatnya Pengumpulan / inventarisasi Data Kependudukan	Persentase pengumpulan / inventarisasi Data Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Subkor Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan	2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan	Subkor Sistem Informasi Administrasi Kependudu-kan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah	
						Meningkatnya Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi	2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Subkor Sistem Informasi Administrasi Kependudu-kan
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2.12.04.2.02.0001Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Subkor Sistem Informasi Administrasi Kependudu-kan
				c. Peningkatan tata kelola SDM dan Teknologi Informasi Komunikasi administrasi kependudukan		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Subkor Pengelolaan SDM dan Teknologi Informasi, Komunikasi
							Jumlah Laporan Hasil	2.12.04.2.04.0001Pembinaan	Subkor Pengelolaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SDM dan Teknologi Informasi, Komunikasi
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2.12.04.2.04.0003Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Subkor Pengelolaan SDM dan Teknologi Informasi, Komunikasi
					Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan		*Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama*	*2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDU-KAN*	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			STR.5 Peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	a. Peningkatan pemanfaatan data		Meningkatnya penyelenggaraan pemanfaatan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Sub Kor Pemanfaatan Data

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				kependudukan		data kependudukan	Kependudukan	Administrasi Kependudukan	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04.2.03.0004Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Sub Kor Pemanfaatan Data
				b. Peningkatan kerjasama terkait urusan administrasi kependudukan		Meningkatnya kerjasama terkait urusan administrasi kependudukan	Persentase penyelenggaraan kerjasama administrasi kependudukan	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sub Kor Kerjasama
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0001Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sub Kor Kerjasama
							Jumlah Dokumen	2.12.04.2.03.0006Kerjasama	Sub Kor Kerjasama

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
							Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	
				c. Peningkatan inovasi pelayanan		Meningkatnya inovasi pelayanan	Persentase penyelenggaraan inovasi administrasi kependudukan	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sub Kor Inovasi Pelayanan
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0003Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sub Kor Inovasi Pelayanan
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0005Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sub Kor Inovasi Pelayanan
		S.4 Meningkatnya jangkauan pemanfaatan profil kependudukan	STR.6 Peningkatan jangkauan pemanfaatan profil kependudu-kan	a. Peningkatan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola		*Persentase pengelolaan profil kependudukan daerah*	*02.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN*	*Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						Meningkatnya penyediaan data kependudukan	Persentase penyediaan data kependudukan	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Subkor Sistem Informasi Administrasi Kependudu-kan
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	2.12.05.2.01.01 Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Subkor Sistem Informasi Administrasi Kependudu-kan
						Meningkatnya Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Subkor Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Subkor Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

4.2. PROGRAM PRIORITAS

Perangkat Daerah Disdukcapil Kota Semarang mendukung pencapaian Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yaitu Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan). Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome Program Prioritas	Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1.	Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan)	Meningkatnya tata Kelola kinerja perangkat daerah			
		Meningkatnya kualitas layanan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
			Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	Program Piroritas	Outcome Program Prioritas	Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
			Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	

No	Program Piroritas	Outcome Program Prioritas	Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pengadaan Mebel	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa pelayanan Umum	
			Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Mebel	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Disdukcapil Kota Semarang pada peiode Renstra terdapat pada lampiran Tabel 4.3. di bawah ini :

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Disdukcapil Kota Semarang

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan						19.914.164.419		22.162.797.398		23.141.507.137		23.321.282.210		23.745.334.373	
2.12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG				21.162.753.510		19.914.164.419		22.162.797.398		23.141.507.137		23.321.282.210		23.745.334.373	
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				340.613.230		342.077.818		378.268.154		394.019.874		396.913.240		403.738.093	
Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna															
	Persentase Perekaman KTP-el	99,35 %	99,37 %	276.317.350	99,40 %	197.234.612	99,45 %	211.264.538	99,50 %	218.666.077	99,55 %	223.599.381	99,60 %	223.599.381	
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen	425.663 dokumen	426.000 dokumen	235.197.430	428.000 dokumen	133.674.692	430.000 dokumen	141.691.426	432.000 dokumen	145.614.309	433.000 dokumen	146.895.025	434.000 dokumen	146.895.025	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	pendaftaran penduduk														
	Jumlah penerbitan KIA	32.031 dokumen	32.100 dokumen		32.125 dokumen		32.150 dokumen		32.175 dokumen		32.200 dokumen		32.225 dokumen		
Meningkatnya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk															
2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	232 dokumen	240 dokumen	8.659.960	245 dokumen	24.659.960	250 dokumen	29.591.953	255 dokumen	27.909.863	260 dokumen	26.305.356	265 dokumen	26.305.356	
2.12.02.2.01.0002Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	0	0	0	107.500 dokumen	28.659.960	108.000 dokumen	28.659.960	108.500 dokumen	30.092.958	109.000 dokumen	28.597.606	109.500 dokumen	28.597.606	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Pendaftaran Penduduk														
2.12.02.2.01.0003Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah laporan permasalahan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	0	0	0	12 laporan	18.659.960	2 laporan	18.659.960	2 laporan	19.592.958	2 laporan	20.572.606	2 laporan	20.572.606	
2.12.02.2.01.0004Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	12 laporan	38.659.960	12 laporan	32.793.964	12 laporan	34.433.662	12 laporan	36.155.345	12 laporan	37.963.113	12 laporan	37.963.113	
2.12.02.2.01.0005Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	319.444 dokumen	320.000 dokumen	187.877.510	323.200 dokumen	28.900.848	326.432 dokumen	30.345.890	329.696 dokumen	31.863.185	332.993 dokumen	33.456.344	336.323 dokumen	33.456.344	
2.12.02.2.02 Penataan	Persentase penataan	100%	100%	41.119.920	100%	63.559.920	100%	69.573.112	100%	73.051.768	100%	76.704.356	100%	76.704.356	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Pendaftaran Penduduk	pendaftaran penduduk														
Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk															
2.12.02.2.03 Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	12 dokumen	12 dokumen	16.159.960	12 dokumen	28.351.962	12 dokumen	32.604.756	12 dokumen	34.234.994	12 dokumen	35.946.744	12 dokumen	35.946.744	
2.12.02.2.04 Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk	6 dokumen	6 dokumen	24.959.960	6 dokumen	35.207.958	6 dokumen	36.968.356	6 dokumen	38.816.774	6 dokumen	40.757.612	6 dokumen	40.757.612	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
sesuai dengan kebutuhan	Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia														
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71,06 %	73,0%	55.635.920	74,0%	169.774.788	75,0%	194.428.357	76,0%	126.639.585	77,0%	123.971.564	78,0%	130.796.417	
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	55.635.920	100%	104.500.173	100%	120.609.129	100%	126.639.585	100%	123.971.564	100%	130.796.417	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100%	100%	55.635.920	100%	79.568.591	100%	93.184.388	100%	97.843.608	100%	93.735.788	100%	99.048.852	
2.12.02.2.03.0002 Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	12 dokumen	12 dokumen	28.225.960	12 dokumen	37.529.129	12 dokumen	44.839.007	12 dokumen	47.080.957	12 dokumen	45.435.005	12 dokumen	49.748.069	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Pendaftaran Penduduk														
2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	12 laporan	27.409.960	12 laporan	42.039.462	12 laporan	48.345.381	12 laporan	50.762.650	12 laporan	48.300.783	12 laporan	49.300.783	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pindah Datang Penduduk	Persentase penyelenggaraan Pindah Datang Penduduk	100%	100%	0	100%	24.931.582	100%	27.424.740	100%	28.795.977	100%	30.235.776	100%	31.747.565	
2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	0	0	0	2 dokumen	8.039.462	2 dokumen	8.843.408	2 dokumen	9.285.579	2 dokumen	9.749.858	2 dokumen	10.237.350	
2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	0	0	0	1 laporan	8.575.500	1 laporan	9.433.050	1 laporan	9.904.703	1 laporan	10.399.938	1 laporan	10.919.935	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.02.2.03.0006 Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	0	1 dokumen	8.316.620	1 dokumen	9.148.282	1 dokumen	9.605.696	1 dokumen	10.085.981	1 dokumen	10.590.280	
2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	100%	100%	8.659.960	100%	40.343.033	100%	46.394.488	100%	48.714.212	100%	49.342.295	100%	49.342.295	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk															
2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk	12 laporan	12 laporan	8.659.960	12 laporan	22.092.958	12 laporan	25.406.902	12 laporan	26.677.247	100%	26.203.481	100%	26.203.481	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.02.2.04.0003 Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	0	0	0	2 laporan	18.250.075	2 laporan	20.987.586	2 laporan	22.036.966	2 laporan	23.138.814	2 laporan	23.138.814	
02.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL				127.109.720		127.656.273		141.161.749		147.039.960		148.119.704		150.666.596	
Meningkatnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun	98,35 %	98,40 %	68.629.840	98,50 %	44.820.457	98,60 %	54.184.142	98,70 %	56.893.349	98,80 %	54.190.361	98,90 %	56.040.786	
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	45.368 dokumen	45.400 dokumen	68.629.840	45.425 dokumen	44.820.457	45.450 dokumen	54.184.142	45.475 dokumen	56.893.349	46.000 dokumen	54.190.361	46.100 dokumen	56.040.786	
	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	20.793 dokumen	20.850 dokumen		20.900 dokumen		20.950 dokumen		21.000 dokumen		21.050 dokumen		21.100 dokumen		

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil															
2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45.368 dokumen	45.400 dokumen	32.239.960	45.425 dokumen	16.119.980	45.450 dokumen	16.925.979	45.475 dokumen	17.772.278	45.480 dokumen	12.725.960	45.485 dokumen	13.362.258	
2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	12 laporan	12 laporan	13.659.960	12 laporan	6.960.517	12 laporan	14.431.205	12 laporan	15.152.765	12 laporan	12.910.403	12 laporan	13.555.923	
2.12.03.2.01.0004 Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk	12 dokumen	12 dokumen	4.909.960	12 dokumen	12.829.980	12 dokumen	13.471.479	12 dokumen	14.145.053	12 dokumen	18.239.582	12 dokumen	18.292.468	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Adminduk terkait Pencatatan Sipil	terkait Pencatatam Sipil														
2.12.03.2.01.0005 Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	6 dokumen	6 dokumen	17.819.960	6 dokumen	8.909.980	6 dokumen	9.355.479	6 dokumen	9.823.253	6 dokumen	10.314.416	6 dokumen	10.830.136	
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	58.479.880	100%	82.835.816	100%	86.977.607	100%	90.146.610	100%	93.929.343	100%	94.625.810	
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	42.319.920	100%	50.899.900	100%	53.444.895	100%	56.117.140	100%	67.198.399	100%	70.558.319	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.03.2.02.0004 Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	12 laporan	21.159.960	12 laporan	10.579.980	12 laporan	11.108.979	12 laporan	11.664.428	12 laporan	18.523.056	12 laporan	19.449.209	
2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 laporan	12 laporan	21.159.960	12 laporan	10.579.980	12 laporan	11.108.979	12 laporan	11.664.428	12 laporan	14.247.645	12 laporan	14.960.027	
2.12.03.2.02.0007 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kepedndudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	0	0	0	2 dokumen	10.579.980	2 dokumen	11.108.979	2 dokumen	11.664.428	2 dokumen	12.247.649	2 dokumen	12.860.032	
2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi	0	0	0	1 laporan	10.579.980	1 laporan	11.108.979	1 laporan	11.664.428	1 laporan	12.247.649	1 laporan	12.860.032	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Pencatatan Sipil														
2.12.03.2.02.0009 Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	0	0	0	1 dokumen	8.579.980	1 dokumen	9.008.979	1 dokumen	9.459.428	1 dokumen	9.932.399	1 dokumen	10.429.019	
2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil	100%	100%	16.159.960	100%	31.935.916	100%	33.532.712	100%	34.029.471	100%	26.730.944	100%	24.067.491	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil															
2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan	16.159.960	12 laporan	16.967.958	12 laporan	17.816.356	12 laporan	17.527.297	12 laporan	14.403.662	12 laporan	12.123.845	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan														
2.12.03.2.03.0004 Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	0	0	2 laporan	14.967.958	2 laporan	15.716.356	2 laporan	16.502.174	2 laporan	12.327.282	2 laporan	11.943.646	
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				20.055.148.868		18.801.797.237		20.932.746.635		21.860.235.002		22.030.601.436		22.432.460.571	
Meningkatnya kualitas layanan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perencanaan, pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	13.408.652.036	100%	13.220.055.500	100%	13.879.835.285	100%	14.573.827.050	100%	15.302.518.402	100%	16.053.336.376	
2.12.01.2.01 Perencanaan,	Tersedianya Dokumen	100%	100%	105.131.636	100%	12.335.590	100%	15.143.712	100%	15.900.898	100%	16.695.942	100%	14.295.941	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD														
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD), RSO dan RTP	3 dokumen	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	1.256.600	3 dokumen	1.884.900	3 dokumen	1.979.145	3 dokumen	2.078.102	3 dokumen	2.078.102	
2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.032.300	1 dokumen	1.083.915	1 dokumen	1.409.090	1 dokumen	1.479.544	1 dokumen	1.553.521	1 dokumen	1.153.521	
2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.251.800	1 dokumen	1.083.915	1 dokumen	1.409.090	1 dokumen	1.479.544	1 dokumen	1.553.521	1 dokumen	1.153.521	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.032.300	1 dokumen	1.083.915	1 dokumen	1.409.090	1 dokumen	1.479.544	1 dokumen	1.553.521	1 dokumen	1.153.521	
2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.251.800	1 dokumen	1.083.915	1 dokumen	1.409.090	1 dokumen	1.479.544	1 dokumen	1.553.521	1 dokumen	1.153.521	
2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	248.418	2 dokumen	1.083.915	2 dokumen	1.409.090	2 dokumen	1.479.544	2 dokumen	1.553.521	2 dokumen	1.153.521	
2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	315.018	2 dokumen	1.083.915	2 dokumen	1.409.090	2 dokumen	1.479.544	2 dokumen	1.553.521	2 dokumen	1.153.521	
2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung	0	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	4.575.500	2 dokumen	4.804.275	2 dokumen	5.044.489	2 dokumen	5.296.713	2 dokumen	5.296.713	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Statistik Sektoral Daerah	Statistik Sektoral Daerah														
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	13.303.520.400	100%	13.207.719.910	100%	13.864.691.573	100%	14.557.926.152	100%	15.285.822.460	100%	16.039.040.435	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65 orang	65 orang	13.066.773.000	68 orang	12.995.883.395	70 orang	13.645.677.565	75 orang	14.327.961.443	80 orang	15.044.359.515	80 orang	15.796.577.491	
2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	236.747.400	12 dokumen	208.584.770	12 dokumen	219.014.009	12 dokumen	229.964.709	12 dokumen	241.462.944	12 dokumen	242.462.944	
2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	248.418	1 laporan	1.083.915	1 laporan	1.409.090	1 laporan	1.479.544	1 laporan	1.553.521	1 laporan	1.153.521	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	248.418	12 laporan	1.083.915	12 laporan	1.409.090	12 laporan	1.479.544	12 laporan	1.553.521	12 laporan	1.153.521	
2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	248.418	1 dokumen	1.083.915	1 dokumen	1.409.090	1 dokumen	1.479.544	1 dokumen	1.553.521	1 dokumen	1.153.521	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	6.646.496.832	0%	5.581.741.737	100%	7.052.911.349	100%	7.286.407.952	100%	6.728.083.034	100%	6.379.124.195	
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelenggaraan administrasi	100%	100%	156.365.720	0%	16.744.225	100%	37.581.436	100%	39.460.508	100%	35.433.533	100%	15.205.210	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Perangkat Daerah	kepegawaian SKPD														
Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah															
5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	100 buah	29.900.000	0	0	0	0	3 paket	37.500.000	
2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 orang	100 orang	156.365.720	100 orang	16.744.225	100 orang	37.581.436	100 orang	39.460.508	100 orang	35.433.533	100 orang	15.205.210	
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	1.351.527.217	100%	1.303.346.138	100%	2.323.693.706	100%	2.424.878.390	100%	2.315.122.308	100%	1.549.122.307	
Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah															

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	27.774.800	1 paket	29.163.540	1 paket	70.621.717	1 paket	74.152.803	1 paket	57.860.443	1 paket	57.860.443	
2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100.706.220	1 paket	105.741.531	1 paket	311.028.608	1 paket	326.580.038	1 paket	328.909.040	1 paket	118.909.040	
2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	126.466.680	2 paket	78.790.014	2 paket	152.729.515	2 paket	160.365.991	2 paket	168.384.290	2 paket	128.384.290	
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	328.996.800	4 paket	425.446.640	4 paket	886.549.392	4 paket	930.876.862	4 paket	850.420.705	4 paket	500.420.705	
2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	90.159.009	4 paket	42.666.960	4 paket	44.800.308	4 paket	47.040.323	4 paket	49.392.340	4 paket	49.392.340	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	24.900.000	12 laporan	19.750.000	12 laporan	20.737.500	12 laporan	21.774.375	12 laporan	22.863.094	12 laporan	22.863.094	
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	360.656.760	12 laporan	305.689.598	12 laporan	336.258.558	12 laporan	338.071.485	12 laporan	321.975.056	12 laporan	288.975.056	
2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	61.560.000	2 dokumen	54.275.560	2 dokumen	62.416.894	2 dokumen	65.537.739	2 dokumen	61.814.626	2 dokumen	61.814.626	
2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	230.306.948	12 dokumen	241.822.295	12 dokumen	438.551.214	12 dokumen	460.478.775	12 dokumen	453.502.714	12 dokumen	320.502.714	
2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik	Tersedianya peralatan dan	100%	100%	223.961.480	100%	556.242.258	100%	357.785.770	100%	375.675.058	100%	394.458.811	100%	1.159.393.011	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	perlengkapan kantor														
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1 unit	310.732.000	0	0	0	0	0	0	1 Unit	864.934.200	
2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	23 unit	23 unit	101.730.350	23 unit	56.816.868	23 unit	59.657.711	23 unit	62.640.596	23 unit	65.772.626	23 unit	65.772.626	
2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit	122.231.130	8 unit	188.693.390	8 unit	298.128.059	8 unit	313.034.462	8 unit	328.686.185	8 unit	228.686.185	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	3.752.809.616	100%	2.830.127.082	100%	3.344.923.165	100%	3.423.303.472	100%	2.978.412.113	100%	2.734.189.211	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	814.100.000	12 laporan	776.000.000	12 laporan	791.520.000	12 laporan	795.477.600	12 laporan	782.454.988	12 laporan	775.454.988	
2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	2.938.709.616	12 laporan	2.054.127.082	12 laporan	2.553.403.165	12 laporan	2.627.825.872	12 laporan	2.195.957.125	12 laporan	1.958.734.223	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	1.161.832.799	100%	875.282.034	100%	988.927.273	100%	1.023.090.524	100%	1.004.656.268	100%	921.214.456	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	23 unit	291.477.462	23 unit	306.051.335	23 unit	336.656.469	23 unit	353.489.292	23 unit	351.163.757	23 unit	322.721.944	
2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit	200 unit	14.544.000	200 unit	15.271.200	200 unit	20.798.320	200 unit	21.838.236	200 unit	22.930.148	200 unit	22.930.148	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 unit	150 unit	410.763.497	150 unit	218.978.767	150 unit	223.358.342	150 unit	227.825.509	150 unit	232.382.012	150 unit	232.382.012	
2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18 unit	410.650.000	18 unit	228.863.000	18 unit	286.078.750	18 unit	291.800.325	18 unit	277.636.332	18 unit	237.636.332	
2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	34.397.840	2 unit	106.117.732	2 unit	122.035.392	2 unit	128.137.161	2 unit	120.544.020	2 unit	105.544.020	
02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				505.265.597		507.438.166		561.122.904		584.489.001		588.781.021		598.905.007	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Meningkatnya sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	233.917.156	100%	243.244.945	100%	255.407.192	100%	263.487.503	100%	266.729.449	100%	269.143.823	
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan															
Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan	Persentase pengumpulan Data Kependudukan	100%	100%	21.159.960	100%	37.667.958	100%	39.551.356	100%	41.528.924	100%	43.605.370	100%	43.605.370	
2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	12 dokumen	21.159.960	12 dokumen	22.217.958	12 dokumen	23.328.856	12 dokumen	24.495.299	12 dokumen	25.720.064	12 dokumen	25.720.064	
2.12.04.2.01.0002 Kerjasama Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama	0	0	0	3 dokumen	15.450.000	3 dokumen	16.222.500	3 dokumen	17.033.625	3 dokumen	17.885.306	3 dokumen	17.885.306	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan														
Meningkatnya dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2 laporan	2 laporan	119.382.461	2 laporan	120.533.515	2 laporan	126.560.191	2 laporan	128.198.152	2 laporan	128.675.631	2 laporan	128.675.631	
2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	2 laporan	119.382.461	2 laporan	120.533.515	2 laporan	126.560.191	2 laporan	128.198.152	2 laporan	128.675.631	2 laporan	128.675.631	
2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	100%	23.659.960	100%	22.842.958	100%	23.985.106	100%	25.184.361	100%	26.443.579	100%	26.443.579	
Meningkatnya Penataan Informasi Administrasi Kependudukan															

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.04.2.02.0001 Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	0	12 dokumen	23.659.960	12 dokumen	22.842.958	12 dokumen	23.985.106	12 dokumen	25.184.361	12 dokumen	26.443.579	12 dokumen	26.443.579	
2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	100%	100%	69.714.775	100%	62.200.514	100%	65.310.539	100%	68.576.066	100%	68.004.869	100%	70.419.243	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Kependudukan														
2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12 laporan	16.221.555	12 laporan	17.032.633	12 laporan	17.884.264	12 laporan	18.778.478	12 laporan	19.717.401	12 laporan	19.717.401	
2.12.04.2.04.0003 Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	2 laporan	53.493.220	2 laporan	45.167.881	2 laporan	47.426.275	2 laporan	49.797.589	2 laporan	48.287.468	2 laporan	50.701.841	
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data	80,00 %	80,00 %	271.348.441	100%	264.193.221	100%	305.715.712	100%	321.001.498	100%	322.051.572	100%	329.761.184	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama														
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
Meningkatnya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	65.972.120	100%	58.548.084	100%	61.475.488	100%	64.549.263	100%	58.776.725	100%	56.322.597	
2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 dokumen	12 dokumen	65.972.120	12 dokumen	58.548.084	12 dokumen	61.475.488	12 dokumen	64.549.263	12 dokumen	58.776.725	12 dokumen	56.322.597	
Meningkatnya kerjasama terkait urusan administrasi kependudukan	Persentase penyelenggaraan kerjasama administrasi kependudukan	24%	24%	64.913.560	26%	58.159.238	28%	79.380.030	30%	83.349.031	32%	81.516.483	32%	83.592.306	
2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	12 laporan	12 laporan	8.899.940	12 laporan	9.344.937	12 laporan	28.125.014	12 laporan	29.531.265	12 laporan	31.007.828	12 laporan	32.558.219	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
2.12.04.2.03.0006 Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 dokumen	10 dokumen	56.013.620	10 dokumen	48.814.301	10 dokumen	51.255.016	10 dokumen	53.817.767	10 dokumen	50.508.655	10 dokumen	51.034.087	
Meningkatnya inovasi pelayanan	Persentase penyelenggaraan inovasi administrasi kependudukan	100%	100%	140.462.761	100%	147.485.899	100%	164.860.194	100%	173.103.204	100%	181.758.364	100%	189.846.281	
2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi terkait pengelolaan informasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi	12 laporan	12 laporan	12.293.220	12 laporan	12.907.881	12 laporan	23.553.275	12 laporan	24.730.939	12 laporan	25.967.486	12 laporan	26.265.859	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan														
2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	6 laporan	128.169.541	6 laporan	134.578.018	6 laporan	141.306.919	6 laporan	148.372.265	6 laporan	155.790.878	6 laporan	163.580.422	
02.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				134.616.095		135.194.925		149.497.956		155.723.301		156.866.809		159.564.106	
Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola	Persentase pengelolaan profil kependudukan daerah	100%	100%	134.616.095	100%	135.194.925	100%	149.497.956	100%	155.723.301	100%	156.866.809	100%	159.564.106	
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan															
Meningkatnya penyediaan data kependudukan	Persentase penyediaan data kependudukan	100%	100%	0	100%	20.000.000	100%	23.000.000	100%	24.150.000	100%	24.635.641	100%	26.671.783	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12.05.2.01.0001 Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0	0	0	2 laporan	20.000.000	2 laporan	23.000.000	2 laporan	24.150.000	2 laporan	24.635.641	2 laporan	26.671.783	
Meningkatnya Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	100%	100%	134.616.095	100%	115.194.925	100%	126.497.956	100%	131.573.301	100%	132.231.168	100%	132.892.323	
2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	134.616.095	2 dokumen	115.194.925	2 dokumen	126.497.956	2 dokumen	131.573.301	2 dokumen	132.231.168	2 dokumen	132.892.323	

4.4. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Disdukcapil Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

4.4.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, tim atau individu telah mencapai tujuan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU membantu mengukur keberhasilan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memantau kemajuan menuju target.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Disdukcapil Kota Semarang yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Semarang. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATU-AN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	94,55	
	Merupakan rata-rata dari Capaian Kinerja sebagai berikut :								
	Persentase Perekaman KTP-el	%	99,37	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	
	Persentase Kepemilikan KK	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kepemilikan KIA	%	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	98,40	98,50	98,60	98,70	98,80	98,90	
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat kinerja pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Angka	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	
6	Persentase peningkatan pemanfaatan profil kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	

4.4.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKK membantu mengukur pencapaian target baik kualitatif maupun kuantitatif. IKK disusun sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disdukcapil Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Perekaman KTP-el	%	Jumlah penduduk ber KTP/ Jumlah penduduk wajib KTP X 100%	99,37	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	-
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak	%	Jumlah KIA yang diterbitkan / jumlah anak usia -17 tahun yang kurang 1 hari X 100%	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	-
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun / jumlah penduduk usia 0-18 tahun X 100%	98,40	98,50	98,60	98,70	98,80	98,90	-
4	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	Jumlah akta kematian yang diterbitkan / Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan X 100%	100	100	100	100	100	100	-
5	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data / Jumlah OPD yang telah memiliki perjanjian kerjasama X 100%	100	100	100	100	100	100	-
6	Jumlah penerbitan KIA	dokumen	Jumlah KIA yang diterbitkan	32.100	32.125	32.150	32.175	32.200	32.225	-
7	Jumlah penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	dokumen	Jumlah akta kelahiran 0-18 tahun yang diterbitkan	20.850	20.900	20.950	21.000	21.050	21.100	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen Disdukcapil untuk mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang profesional, transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan transformasi digital pemerintahan.

Renstra ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat peran Disdukcapil, tidak hanya sebatas penyediaan layanan kependudukan, tetapi juga sebagai basis data utama yang mendukung perencanaan pembangunan daerah lintas sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Dengan dukungan data kependudukan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, diharapkan seluruh program pembangunan di Kota Semarang dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029 tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi yang erat, baik antar-perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Oleh karena itu, semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan prima menjadi kunci utama dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhirnya, dengan semangat pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, Disdukcapil Kota Semarang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, memperkuat integrasi data, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Semarang yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Semoga Renstra Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman yang operasional, aplikatif, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Semarang

16. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta sebagai bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Renstra ini disusun berdasarkan kerangka hukum yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya pembangunan yang direncanakan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang secara teknis mengarahkan proses penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan di daerah.

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah, kedudukan Renstra Perangkat Daerah memiliki posisi strategis yang berfungsi menghubungkan perencanaan makro dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih teknis dan operasional.

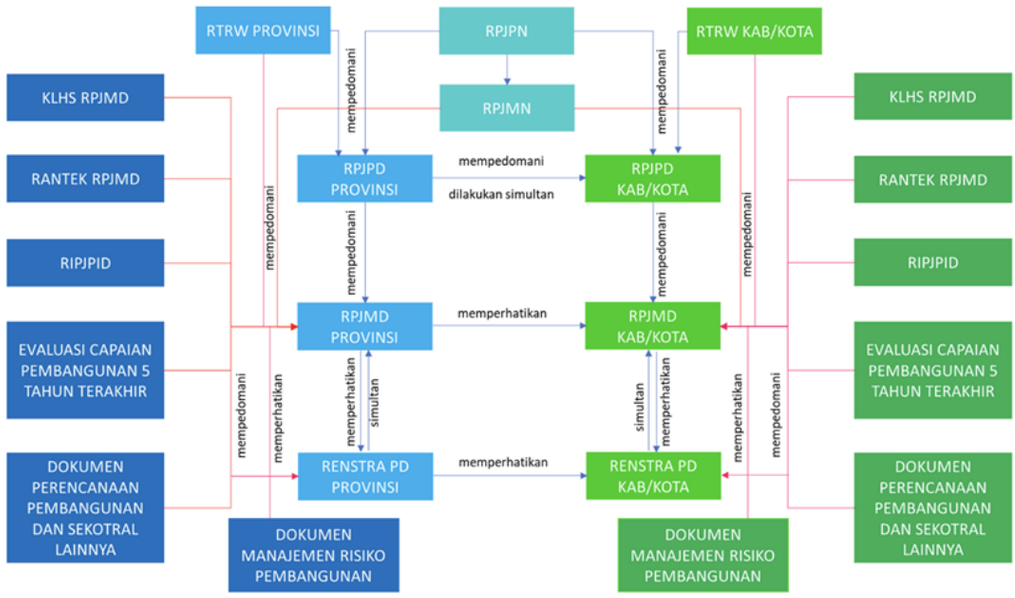

Gambar 1.1.
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sehubungan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renstra Disdalduk KB Kota Semarang juga perlu memperhatikan Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Disdalduk KB, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdalduk KB Kota Semarang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025–2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang (Berita daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 105); dan
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Disdalduk KB Kota Semarang beserta Stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Disdalduk KB Kota Semarang secara berkesinambungan serta guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah :
1. Menjadi kerangka dasar bagi Disdalduk KB Kota Semarang dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Disdalduk KB;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Disdalduk KB Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja; dan
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Disdalduk KB Kota Semarang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah dilengkapi dengan perangkat oragnisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengendalian Penduduk;
4. Bidang Keluarga Berencana;
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
7. UPTD; dan
8. Jabatan Fungsional.

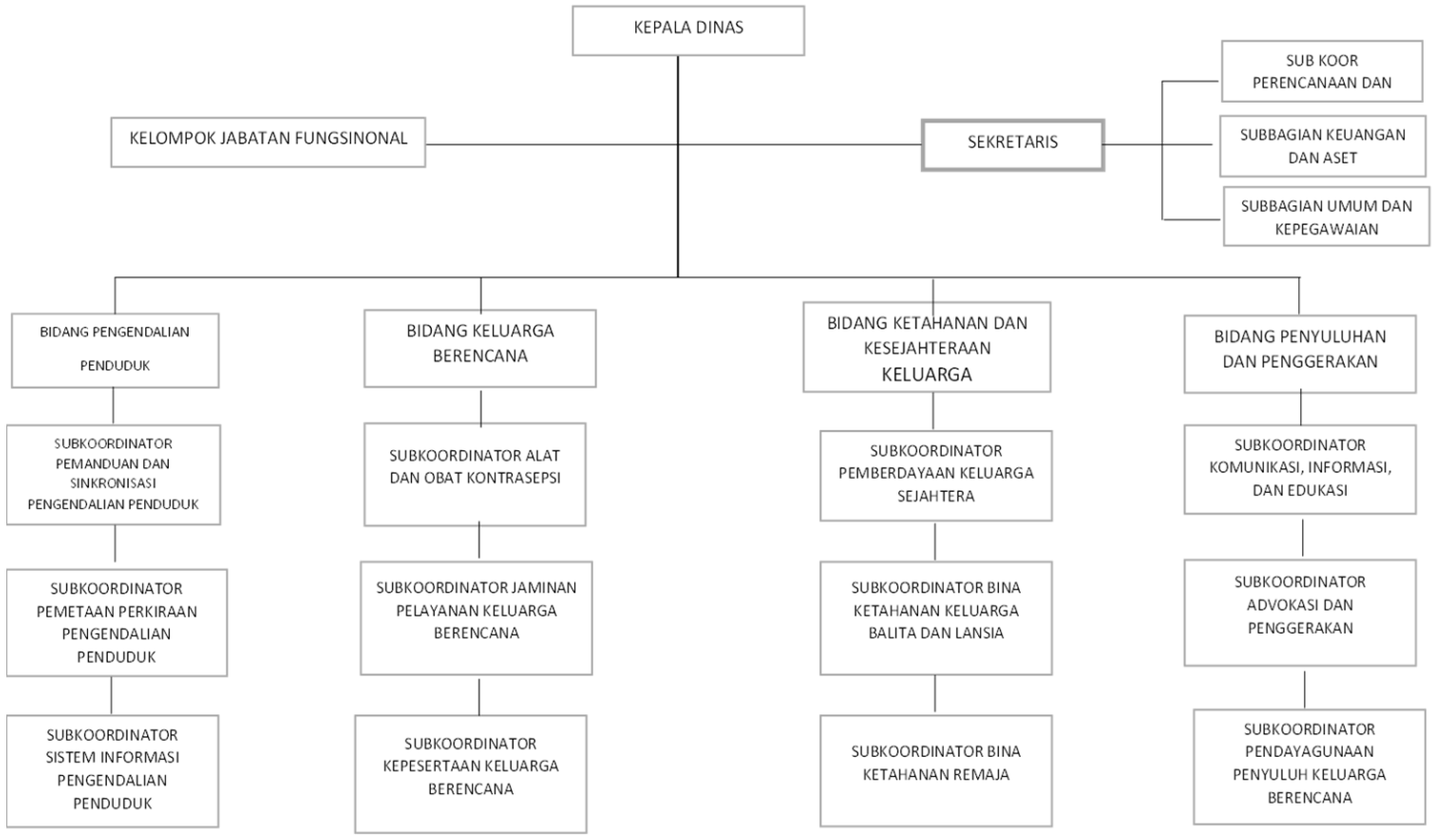

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

   Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan UPTD. Sekretaris diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c) pengoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan UPTD;
   d) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan UPTD;
   e) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   f) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kesekretariatan Dinas;
   g) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
   h) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
   i) pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
   j) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
   k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
   l) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
   m) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;

n) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
o) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
p) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
q) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
r) pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
s) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
t) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
u) pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
v) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
w) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
x) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
y) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
z) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan perencanaan dan evaluasi dibentuk Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi.

3. Bidang Pengendalian Penduduk

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pemanduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, dan Sistem Informasi Pengendalian Penduduk. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk;
e) pelaksanaan kegiatan pengembangan konsep pembangunan kependudukan;
f) pelaksanaan kegiatan perluasan jejaring kemitraan dalam pemaduan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;

g) pelaksanaan kegiatan analisa bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk;
h) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan analisa bahan integrasi isu kependudukan dalam perencanaan daerah;
i) pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan daerah;
j) pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
k) pelaksanaan kegiatan dukungan operasional dalam pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
l) pelaksanaan profil pengendalian penduduk;
m) pelaksanaan kegiatan analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan daerah;
n) pelaksanaan kegiatan penyusunan penetapan sasaran pengendalian penduduk;
o) pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
p) pelaksanaan kegiatan pengolahan, analisis data kependudukan dan Keluarga Berencana ;
q) pelaksanaan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kota ;
r) pelaksanaan kegiatan analisis dan pengkajian proyeksi perkiraan pengendalian penduduk cakupan Kota;
s) pelaksanaan kegiatan dukungan operasional dalam pelaksanaan Pemetaan Perkiraan pengendalian Penduduk;
t) pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemetaan perkiraan pengendalian Penduduk;
u) pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga untuk memperoleh data mikro pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, dan tahapan keluarga;
v) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
w) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
x) pelaksanaan kegiatan penyusunan penetapan kebijakan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
y) pelaksanaan kegiatan dukungan operasional untuk pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
z) pelaksanaan kegiatan penyusunan perkiraan sasaran dan petunjuk teknis pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
aa) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan sarana untuk pengolahan dan penyajian data dan informasi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
bb) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pengendalian Penduduk;
cc) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pengendalian Penduduk;

dd) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk; dan
ee) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas Subkoordinator Pemanduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk, Subkoordinator Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, dan Subkoordinator Sistem Informasi Pengendalian Penduduk.

4. Bidang Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Alat dan Obat Kontrasepsi, Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dan Kepesertaan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Keluarga Berencana;
e) pelaksanaan kegiatan penyusunan data sasaran penerima dan pengolah alat dan obat kontrasepsi;
f) pelaksanaan kegiatan pelayanan prasarana dan sarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
g) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan koordinasi/hubungan kerja dengan instansi terkait untuk melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian dan distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
h) pelaksanaan kegiatan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan penerima dan pemakai Alat dan Obat Kontrasepsi;
i) pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi peserta KB baru maupun aktif;
j) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan layanan prasarana dan sarana pengendalian dan distrubusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
k) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan bimbingan teknis tenaga pengelola alat dan obat kontrasepsi;
l) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi serta peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
m) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kerja sama dengan mitra kerja dalam pelayanan KB;
n) pelaksanaan kegiatan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
o) pelaksanaan kegiatan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta KB baru, peserta KB aktif serta peserta KB mandiri;

p) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kerjasama dengan mitra kerja dalam pelayanan KB;
q) pelaksanaan kegiatan penggerakan pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang;
r) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam pelayanan Keluarga Berencana;
s) pelaksanaan kegiatan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat untuk pelayanan KB, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
t) pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep kemitraan dibidang pembinaan kesertaan program Keluarga Berencana;
u) pelaksanaan kegiatan peningkatan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan Keluarga Berencana;
v) pelaksanaan kegiatan penggerakan mitra kerja dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan Keluarga Berencana;
w) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan ayoman komplikasi berat bagi pengguna Metode KB Jangka Panjang;
x) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan ayoman kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi;
y) pelaksanaan kegiatan kemitraan dalam penanganan komplikasi dan kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi;
z) pelaksanaan kegiatan pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana;
aa) pelaksanaan kegiatan pembinaan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi);
bb) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Keluarga Berencana;
cc) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Keluarga Berencana;
dd) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana; dan
ee) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana terdiri atas Subkoordinator Alat dan Obat Kontrasepsi, Subkoordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dan Subkoordinator Kepesertaan Keluarga Berencana.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia, dan Bina Ketahanan Remaja. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

e) pelaksanaan kegiatan pengembangan kemitraan usaha, sumber permodalan, jaringan permodalan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
f) pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
g) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga;
h) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga;
i) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pendampingan atau magang bagi para kader atau anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
j) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
k) pelaksanaan kegiatan penumbuhan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
l) pelaksanaan bahan penyusunan penetapan, penyelenggaraan, penumbuhan dan pengembangan sasaran kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
m) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengembangan Pembangunan Keluarga melalui bina keluarga balita dan anak;
n) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengembangan Pembangunan Keluarga melalui bina keluarga lansia dan rentan;
o) pelaksanaan kegiatan penyusunan program pembinaan keluarga balita dan lansia;
p) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga balita dan Lansia serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
q) pelaksanaan kegiatan untuk penggandaan Alat Permainan Edukatif (APE), alat peraga dan sarana pendukung lainya dalam kegiatan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
r) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dukungan pelayanan dan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan balita, anak dan lansia;
s) pelaksanaan kegiatan pengembangan kerja sama dengan mitra kerja dalam bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
t) pelaksanaan kegiatan fasilitasi upaya pelaksanaan promosi pemenuhan hak- hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
u) pelaksanaan kegiatan penyusunan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan Human *Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
v) pelaksanaan kegiatan dukungan operasional pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);

w) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human *Immunodeficiency* virus/ *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
x) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program bina ketahanan remaja jalur pendidikan;
y) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengembangan program bina ketahanan remaja jalur masyarakat penyusunan program pengembangan kelompok usaha ekonomi keluarga,
z) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan bina keluarga remaja;
aa) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
bb) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
cc) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
dd) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas Subkoordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Subkoordinator Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia, dan Subkoordinator Bina Ketahanan Remaja.

6. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Advokasi dan Penggerakan, dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
e) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan atau materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga sesuai dengan kearifan budaya lokal;
f) pelaksanaan kegiatan perencanaan prasarana dan sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
g) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan upaya-upaya pengembangan model kegiatan penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kearifan dan budaya lokal;
h) pelaksanaan kegiatan penyusunan penetapan kebijakan dan pengembangan penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

i) pelaksanaan kegiatan penyusunan penetapan perkiraan sasaran dan kriteria penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kearifan dan budaya lokal;
j) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan operasional penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kearifan dan budaya lokal;
k) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan advokasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
l) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peran serta organisasi masyarakat dalam pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
m) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan upaya-upaya pengembangan model kegiatan advokasi dan Penggerakan masyarakat dalam pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ;
n) pelaksanaan kegiatan penyusunan penetapan perkiraan sasaran dan kriteria advokasi dan Penggerakan masyarakat dalam pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
o) pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep kemitraan di bidang pembinaan kesertaan KB dan Ketahanan keluarga;
p) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan operasional advokasi dan Penggerakan masyarakat dalam pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
q) pelaksanaan kegiatan peningkatan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk;
r) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penggerakan mitra kerja dalam pengendalian penduduk, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB , ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
s) pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep pendayagunaan tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB;
t) pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengembangan serta monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan ;
u) pelaksanaan kegiatan penyusunan perkiraan sasaran dan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP);
v) pelaksanaan kegiatan pengelolaan personil, pembinaan teknis dalam mendukung operasional program, termasuk jajaran tokoh masyarakat dan tokoh agama;
w) pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka kemandirian dan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
x) pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP);
y) pelaksanaan kegiatan penyusunan instrumen pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKB atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP);
z) pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP);

aa) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembinaan tenaga PKB atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP);
bb) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
cc) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
dd) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan; dan
ee) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas Subkoordinator Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan, dan Subkoordinator Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana.

7. UPTD

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2024, terlihat bahwa komposisi pegawai didominasi oleh lulusan strata satu (S1) sebanyak 22 orang, diikuti lulusan strata dua (S2) sebanyak 10 orang, sementara lulusan diploma III (DIII) hanya 2 orang, dan lulusan SMA hanya 1 orang. Tidak ada pegawai dengan tingkat pendidikan SD maupun SMP. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yang mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kinerja organisasi. Sekretariat merupakan unit kerja dengan jumlah pegawai terbanyak (9 orang), diikuti Bidang Pengendalian Penduduk (7 orang), Bidang Keluarga Berencana (6 orang), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (5 orang), Bidang Penyuluhan dan Penggerakan (5 orang), serta Non ASN (3 orang). Komposisi ini mengindikasikan bahwa secara umum, Dinas memiliki tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan memadai untuk menunjang pelaksanaan program, meskipun masih relatif terbatas pada jenjang tertentu seperti DIII dan SMA. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Dinas Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024

Bidang	SD		SMP		SMA		DIII		S1		S2		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	1	9
Pengendalian Penduduk	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	1	7
Keluarga Berencana	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	6
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5
Penyuluhan dan Penggerakan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	5
Non ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**8**	**14**	**2**	**8**	**35**

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2024 menurut golongan, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai berada pada golongan III sebanyak 20 orang, disusul golongan IV sebanyak 9 orang, golongan II sebanyak 6 orang, sementara tidak ada pegawai yang berada pada golongan I. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai sudah berada pada level golongan menengah ke atas yang mencerminkan tingkat kepangkatan dan masa kerja yang relatif tinggi. Unit kerja dengan jumlah pegawai terbanyak adalah Sekretariat (9 orang), diikuti Bidang Pengendalian Penduduk (7 orang), Bidang Keluarga Berencana (6 orang), serta Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Bidang Penyuluhan dan Penggerakan masing-masing 5 orang, sedangkan Non ASN berjumlah 3 orang. Komposisi ini mengindikasikan bahwa secara struktural, pegawai Dinas memiliki kualifikasi golongan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program, meskipun masih terdapat ketimpangan distribusi terutama antara golongan II dan golongan IV. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024

Bidang	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sekretariat	0	0	0	0	1	6	1	1	9
Pengendalian Penduduk	0	0	0	2	4	0	0	1	7
Keluarga Berencana	0	0	0	0	1	2	0	3	6
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	0	0	4	1	0	5
Penyuluhan dan Penggerakan	0	0	1	0	0	2	0	2	5
Non ASN	0	0	2	1	0	0	0	0	3
Jumlah	**0**	**0**	**3**	**3**	**6**	**14**	**2**	**7**	**35**

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Aset tanah dan bangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang berada di Jl. Prof. Soedarto, SH No.116, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik. Tanah seluas 5.546 m^2 berstatus hak pakai dengan sertifikat resmi, sedangkan bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari gedung krematorium permanen seluas 250 m^2 dan gedung tempat kerja permanen seluas 304 m^2. Seluruh bangunan dalam kondisi baik sehingga layak digunakan untuk mendukung kegiatan dinas. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.546,00	2009	Jl. Prof. Soedarto, SH No. 116, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik	Hak Pakai	5/22/ 2020	00031	Kantor Disdalduk KB	Pembelian	16.675.300,00	Hasil Penilaian Tahun 2009

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	250	Jl. Prof. Soedarto, SH No.116, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	274.264,46
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	304	Jl. Prof. Soedarto, SH No.116, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	411.504,35

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

a. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Tingkat capaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berdasarkan data pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2019-2024, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik. Angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR) konsisten turun di bawah target (1,76 pada 2024) yang menunjukkan keberhasilan pengendalian kelahiran, namun menjadi perhatian karena berdampak ke penurunan jumlah penduduk dalam jangka panjang apabila tidak disertai dengan migrasi penduduk. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun juga menurun hingga 0,33% pada 2024, lebih rendah dari target. Peserta KB aktif tercapai stabil dengan capaian di atas target pada 2023–2024, sementara *unmet need* menurun signifikan menjadi 5,13% di 2024, menandakan peningkatan akses layanan KB. Cakupan anggota Bina Keluarga aktif mengalami fluktuasi, namun pada 2024 kembali meningkat hingga 72,08% melampaui target. Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO) terus menurun hingga 5% pada 2024, lebih baik dari target 10,9%. Selain itu, indikator pelayanan administrasi perkantoran, sarana-prasarana aparatur, serta tertib pelaporan kinerja dan keuangan konsisten mencapai 100%. Kondisi ini mencerminkan peningkatan efektivitas program serta manajemen kelembagaan yang relatif baik.

Pengukuran kinerja pelayanan dari urusan yang dilaksanakan dilakukan setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	*Total Fertility Rate* (TFR)	Angka	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,99	1,99	1,75	1,74	1,76	100	100	100	87,50	87,00	88,00
2.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 Tahun	%	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,58	0,58	0,58	0,39	0,31	0,33	100	100	86,2	100	100	100
3.	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	%	76,98	77,32	77,04	77,14	77,24	77,34	77,47	74,99	73,88	76,08	77,72	77,73	100	97	94,71	98,75	100	100
4.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	8,44	7,72	9,08	8,56	8,04	7,52	9,63	10,46	10,89	9,13	8,42	5,13	100	100	100	99,45	95,27	100
5.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	%	56,86	58,86	60,02	60,12	60,22	60,32	54,63	47,68	39,39	72,90	69,51	72,08	96	81	65,62	100	100	100
6.	Cakupan tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	%	11,60	11,40	11,20	11,10	11,00	10,90	8,42	11,74	19,63	7,91	6,18	5,00	73	100	57,05	100	100	100
7.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	76,98	76,94	76,94	76,94	76,94	76,94	75,4	76.94	77	76,09	77,72	77,49	98,17	100,00	100,00	121,67	100,75	100,32
8.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pencapaian pelayanan kinerja ini merupakan bukti dari tingginya komitmen seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, didukung oleh sumber daya yang memadai. Kondisi anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, yang mencerminkan rasio antara realisasi dan anggaran, dapat dinilai baik atau kurang baik. Berikut adalah anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022-2024.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Semarang

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2022–2024, terlihat bahwa tingkat realisasi anggaran secara umum cukup tinggi meskipun bervariasi antarprogram. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki anggaran terbesar dengan realisasi stabil di atas 92%, meski belum mencapai 100%. Program Pengendalian Penduduk menunjukkan konsistensi dengan rasio realisasi sangat tinggi (95,88%–97,68%). Program Pembinaan Keluarga Berencana mengalami peningkatan signifikan, di mana pada 2022 realisasi baru 86,57% namun meningkat hingga 97,12% pada 2024, mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran yang semakin baik. Sementara itu, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera sempat rendah pada 2022 (68,54%), namun berhasil meningkat drastis hingga hampir 100% pada 2024 (99,93%). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan anggaran yang semakin optimal dari tahun ke tahun.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		(I) 2020	(II) 2021	(III) 2022	(IV) 2023	(V) 2024	(I) 2020	(II) 2021	(III) 2022	(IV) 2023	(V) 2024	2020	2021	2022	2023	2024
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.292.000.583	8.713.186.984	8.654.517.690	10.421.787.021	10.476.473.946	6.272.071.079	7.243.565.663	8.225.275.534	9.633.113.522	9.809.831.554	86,01	83.14	95,04	92,4	93,64
2	Program Pengendalian Penduduk	194.901.500	643.703.207	654.232.666	1.115.571.020	1.458.391.663	194.679.500	599.094.521	627.277.889	1.089.117.401	1.424.526.623	99.89	93.08	95,88	97,6	97,68
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.753.596.240	9.735.057.886	10.512.980.104	13.855.033.780	18.671.893.430	6.510.255.840	9.380.697.121	9.100.994.944	12.428.523.162	18.134.951.275	96,40	96.36	86,57	93,4	97,12
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	422.370.000	1.040.276.812	9.014.862.150	9.052.952.232	9.629.102.799	422.370.000	991.921.043	6.178.701.378	9.182.472.944	9.622.451.448	100	95.35	68,54	98,8	99,93

c. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1. Instansi Pemerintah

   Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang bermitra erat dengan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. BKKBN Provinsi Jawa Tengah menjadi pembina teknis utama dalam penyusunan kebijakan dan monitoring program kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga. Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A, serta Bappeda, yang berperan dalam integrasi program sesuai kewenangan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan pun menjadi mitra strategis dalam menggerakkan kegiatan langsung di masyarakat.

2. Fasilitas Layanan Kesehatan

   Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tidak lepas dari dukungan fasilitas layanan kesehatan. Dinas bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, klinik KB, praktik dokter, dan bidan swasta dalam menyediakan akses kontrasepsi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Dengan kolaborasi ini, layanan KB menjadi lebih dekat, mudah dijangkau, dan berkualitas bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Semarang.

3. Organisasi dan Lembaga Masyarakat

   Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program KB. Dinas bermitra dengan PKK, Posyandu, organisasi perempuan, karang taruna, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam penyuluhan, advokasi, dan penggerakan keluarga untuk berpartisipasi dalam program KB. Melalui dukungan lembaga masyarakat, pesan-pesan pembangunan keluarga dapat lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat luas.

4. Mitra Non-pemerintah dan Swasta

   Selain pemerintah, Dinas juga menjalin kemitraan dengan lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta sektor swasta. LSM berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan advokasi, sedangkan perguruan tinggi mendukung riset, edukasi, serta inovasi program berbasis akademik. Sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat berkontribusi, misalnya dalam mendukung program kependudukan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan keluarga.

5. Media Massa dan Komunitas

   Media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, merupakan mitra penting dalam menyebarluaskan informasi terkait program kependudukan dan KB. Melalui media, pesan edukasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan efektif. Selain itu, komunitas peduli kesehatan, komunitas remaja, serta organisasi masyarakat sipil juga berperan aktif dalam kampanye, penyuluhan, dan kegiatan advokasi di tingkat akar rumput.

d. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Berikut adalah inovasi yang telah diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang:

a. PRIMADONA lahir pada tanggal 1 Agustus 2023, merupakan inovasi yang dikembangkan karena pencatatan dan pelaporan masih manual kondisi tersebut tidak sesuai dengan perkembangan digitalisasi. Tujuan PRIMADONA adalah untuk mendukung program Bangga Kencana yaitu Pelaporan Pelayanan KB dan Dallap melalui upaya digitalisasi pelaporan sesusi dengan perkembangan zaman sehingga monitoring pelaporannya bisa langsung di buka di aplikasi PRIMADONA. PRIMADONA adalah aplikasi yang menyediakan pelaporan Yan KB dan Dallap setiap bulannya dan bisa langsung di monitoring dan di akses setiap saat.
b. PANAH ASMARA (Pelayanan KB Gratis dengan Muyan (Mobil Unit Pelayanan) di Kota Semarang) lahir pada Maret 2023, merupakan inovasi yang dikembangkan karena tingginya angka stunting pada tahun 2021. Tujuan PANAH ASMARA adalah untuk mendukung SDGs 2, yaitu "Pemberantasan Kelaparan, Pencapaian Ketahanan Pangan, Peningkatan Gizi, dan Promosi Pertanian Berkelanjutan". Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya stunting, membantu dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan serta mengendalikan pertumbuhan populasi agar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
c. Pawon Sehat Ngopeni Stunting (PANSOS) merupakan inovasi tentang praktek baik penyajian menu makanan bergizi pada keluarga risiko Stunting yang memiliki calon pengantin (catin) dan baduta / balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu. Inovasi Pansos ini merupakan salah satu upaya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam percepatan penurunan stunting di Kota Semarang.

   Secara umum kegiatan PANSOS bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan:

   - Menyediakan sumber pangan sehat dan padat gizi untuk masyarakat, khususnya keluarga risiko stunting, yaitu keluarga yang memiliki anak bayi dan balita, ibu hamil, ibu menyusui dan calon pasangan usia subur atau calon pengantin.
   - Mengolah dan mendistribusikan makanan tambahan bernutrisi seimbang kepada keluarga risiko stunting;
   - MemberikanKIEgizidanpelatihankepadakeluargarisikostunting untuk pencegahan dan penanganan stunting dan penyiapan generasi emas;

e. Penghargaan Perangkat Daerah

Prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 yaitu :

1. Terbaik 1 Grand Design Pembangunan Kependudukan Award Nasional Tahun 2024.
2. Juara 2 Sewagati Kencana Madya dalam Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Nasional Tahun 2024.
3. Penghargaan BKKBN Kepada Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Harganas, 29 Juni 2024.
4. Terbaik 2 Regional II BKB Nasional Tahun 2024.
5. Top 5 BKR Percontohan Nasional Tahun 2024.
6. Juara 1 Duta Genre Putra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
7. Juara 1 BKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
8. Juara 2 Akseptor Lestari 20 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
9. Juara 2 PIK Remaja Segmentasi 15-19 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
10. Juara 2 Pelayanan KB Aisyiyah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
11. Juara 2 Lomba Klinik Swasta dan Role Model Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
12. Juara 3 PIK Remaja Segmentasi 10 -14 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi sejumlah tantangan utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target. Tantangan-tantangan tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Belum Efektif
   a) Upaya advokasi dan penyebaran informasi terkait program KB dan pengendalian penduduk masih kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah peserta KB baru serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat program KB bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
   b) Kurangnya inovasi dalam metode penyampaian informasi membuat target kelompok, khususnya masyarakat usia subur di daerah terpencil, sulit dijangkau.
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Belum Merata
   a) Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern Rendah : Penggunaan metode kontrasepsi modern tidak mengalami peningkatan signifikan, yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan kependudukan.
   b) Tingginya Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) : Banyak pasangan usia subur (PUS) yang masih belum memiliki akses atau belum mendapat pelayanan KB yang memadai.
   c) Kesenjangan Kesertaan KB: Tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR) masih menunjukkan disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok sosial-ekonomi.

d) Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi Tinggi: Tingginya angka drop-out pengguna kontrasepsi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih intensif dalam memastikan keberlanjutan penggunaan alat kontrasepsi.
e) Preferensi pada Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (Non-MKJP): Penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik terus meningkat, sementara metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implan justru menurun.
f) Rendahnya Kesertaan KB Pria: Partisipasi pria dalam program KB masih sangat rendah karena stigma sosial dan kurangnya informasi mengenai metode KB untuk pria.

3. Tingginya Angka Kelahiran pada Perempuan Remaja (Usia 15–19 Tahun)
   a) Kesenjangan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR): Program pembinaan kesehatan reproduksi remaja belum optimal, sehingga masih banyak remaja yang kurang memahami risiko kehamilan dini dan dampaknya terhadap kesehatan serta masa depan mereka.
   b) Rendahnya Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi: Minimnya akses terhadap informasi membuat perilaku berisiko di kalangan remaja tetap tinggi.
   c) Optimalisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R/M): PIK R/M sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi dan konseling kepada remaja belum berfungsi maksimal, baik dari segi cakupan maupun kualitas pelayanannya.
4. Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Belum Optimal
   a) Pelaksanaan program ketahanan keluarga belum memberikan dampak signifikan dalam menjaga keberlanjutan peserta KB aktif.
   b) Peran Kelompok Kegiatan (Poktan) Belum Maksimal: Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KB.
   c) Kurangnya pembinaan berkelanjutan untuk kelompok kegiatan ini mengakibatkan rendahnya pengaruh mereka dalam mendorong pelestarian kesertaan KB aktif.

Dengan menghadapi tantangan ini secara strategis, melalui penguatan advokasi, perluasan akses pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi kelompok kegiatan, Dinas Dalduk & KB dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk yang berkelanjutan.

b. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjawab tantangan dan meningkatkan pelayanannya mencakup hal-hal berikut :

1. Komitmen dan Dukungan Pemerintah

a. Dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat : Adanya komitmen dari berbagai tingkatan pemerintah terhadap program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) memberikan peluang besar untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, penguatan kebijakan, serta fasilitasi koordinasi lintas sektor.
b. Keterlibatan Legislatif : Dukungan dari lembaga legislatif dapat membantu mempercepat pengesahan kebijakan atau regulasi yang mendukung program KB dan pembangunan keluarga.

2. Peran Mitra Kerja yang Semakin Dapat Diandalkan
   a. Kolaborasi dengan Mitra Kerja : Meningkatnya peran mitra kerja, baik dari sektor swasta, lembaga masyarakat, maupun organisasi internasional, dapat mendukung implementasi program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara lebih efektif.
   b. Peningkatan Kapasitas Melalui Kemitraan : Mitra kerja dapat berkontribusi melalui pelatihan tenaga lapangan, penyediaan alat kontrasepsi, penyuluhan masyarakat, dan peningkatan akses pelayanan di daerah terpencil.
   c. Dukungan dari LSM dan Komunitas Lokal : Peran aktif lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program KB dapat menjadi kekuatan tambahan untuk menjangkau wilayah yang belum optimal.

Dengan memanfaatkan peluang ini secara strategis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang dapat memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kualitas program, dan mengatasi berbagai tantangan yang ada demi mencapai tujuan pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk yang berkelanjutan.

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, setelah mempelajari dan memahami hasil

capaian kinerja serta analisis gambaran umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dirumuskan permasalahan utama dalam pembangunan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Permasalahan utama tersebut adalah :

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Koa Semarang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas keluarga serta pembangunan kependudukan dan keluarga berencana	Belum Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Belum optimalnya pemaduan dan sinkronisasi pengendalian penduduk
		Belum optimalnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
		Belum Optimalnya sistem informasi pengendalian penduduk
	Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana	Belum Efektifnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana
		Kompetensi tenaga Penyuluh Keluarga Berencana tidak mengalami peningkatan
		Belum optimalnya advokasi dan penggerakan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Belum Optimalnya cakupan Pelayanan Keluarga Berencana	Kepesertaan KB yang stagnan atau menurun
		Belum optimalnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan
		Belum optimalnya jaminan pelayanan KB
	Belum optimalnya upaya keluarga sejahtera	Belum Optimalnya pemberdayaan kelompok Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia
		Belum Optimalnya pemberdayaan kelompok Bina Ketahanan Keluarga Remaja
		Belum Optimalnya pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Belum optimalnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum Optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan
		Belum optimalnya administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan
		Belum optimalnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		belum optimalnya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Belum optimalnya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Belum optimalnya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Belum optimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Koa Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemaduan dan sinkronisasi pengendalian penduduk
2. Belum optimalnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
3. Belum Optimalnya sistem informasi pengendalian penduduk
4. Belum Efektifnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana
5. Kompetensi tenaga Penyuluh Keluarga Berencana tidak mengalami peningkatan
6. Belum optimalnya advokasi dan penggerakan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
7. Kepesertaan KB yang stagnan atau menurun
8. Belum optimalnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan
9. Belum optimalnya jaminan pelayanan KB
10. Belum Optimalnya pemberdayaan kelompok Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia
11. Belum Optimalnya pemberdayaan kelompok Bina Ketahanan Keluarga Remaja
12. Belum Optimalnya pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
13. Belum Optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan
14. Belum optimalnya administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan
15. Belum optimalnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. belum optimalnya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Belum optimalnya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Belum optimalnya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19. Belum optimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menempatkan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sebagai salah satu prioritas strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan nasional diarahkan pada pembangunan keluarga berkualitas, pengendalian fertilitas, peningkatan efektivitas program KB, serta penguatan tata kelola kependudukan melalui pendekatan berbasis data, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam RPJMN 2025–2029 ditegaskan bahwa pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk merupakan prasyarat penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung pembangunan. Kebijakan nasional juga menekankan pentingnya menurunkan angka fertilitas total (*Total Fertility Rate*/TFR), menekan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), serta memperkuat partisipasi pria dalam ber-KB. Di sisi lain, pembinaan ketahanan keluarga dan edukasi kesehatan reproduksi remaja diarahkan untuk mencegah pernikahan usia dini, kehamilan remaja, serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menegaskan bahwa upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Semarang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan KB yang merata, penguatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE), pengembangan sistem informasi berbasis digital, serta pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKA.

Target-target nasional dalam RPJMN juga diadopsi dalam Renstra Disdalduk KB Kota Semarang, seperti pengendalian TFR di angka 2,0, penurunan *unmet need* hingga 4,78 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari 66,58 pada tahun 2025 menjadi 70,50 pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan keluarga berkualitas, menyiapkan generasi emas, serta memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Dengan demikian, Renstra Disdalduk KB Kota Semarang 2025–2029 tidak hanya menjadi pedoman teknis pelaksanaan program di daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung capaian RPJMN 2025–2029, khususnya di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, serta peluang yang ada di Kota Semarang, dan juga memperhatikan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan untuk lima tahun mendatang harus berlandaskan pada visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum tentang apa yang ingin diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode

kepemimpinan. Visi ini berfungsi sebagai fokus dan arah pembangunan, serta landasan dalam merancang program kerja selama lima tahun kepemimpinan kepala daerah yang terpilih. Pentingnya visi Kota Semarang terletak pada kemampuannya untuk menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah. Visi ini akan menjadi panduan yang jelas bagi seluruh elemen masyarakat Kota Semarang, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan adanya visi yang jelas, seluruh pihak dapat bekerja sama secara terarah dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Berikut visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Visi tersebut didukung oleh misi:

Misi 1 Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian

Misi 2 Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi

Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 29 strategi dan 38 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Terkait hal ini, secara lengkap peranan Disdalduk KB dalam mendukung pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang beserta tujuan, sasaran tersaji pada gambar berikut.

c. Telaahan Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN merupakan kementerian / lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangga Kencana. Kemendukbangga/BKKBN dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2025-2029 memiliki panduan yaitu Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Adapun Visi Kemendukbangga/BKKBN adalah :

"Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan dan Sasaran Kemendukbangga/BKKBN sebagai berikut:

Misi 1 **Mendukung Misi Presiden melalui Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 **Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas**, dengan sasaran:

Sasaran 1 Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga

Sasaran 2 Meningkatnya pencegahan kehamilan di usia 15-19 tahun

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk

Sasaran 4 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi

Sasaran 5 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana

Sasaran 6 Terwujudnya kebijakan bidang pengendalian penduduk, Pembangunan keluarga, dan penyelenggaraan keluarga berencana yang berkualitas dan inklusif

Sasaran 7 Terwujudnya Kemendukbangga /BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat

d. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Renstra untuk periode tahun 2025-2029, dimana dalam Renstra tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DP3AP2KB selama Tahun 2025 - 2029 yaitu :

Tujuan 1 **Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak**, dengan sasaran:

Sasaran 1 Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Pembangunan

Sasaran 2 Meningkatnya Perlindungan Anak

Tujuan 2 **Meningkatkan Keluarga Berkualitas**, dengan sasaran:

Sasaran 1 Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Pembangunan

Sasaran 2 Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Dalam telaahan rencana tata ruang wilayah diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan

kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu poin penting dalam penyusunan KLHS adalah melihat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hasil pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam kajian ini, dari penapisan indikator TPB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah 196 indikator. Dari 196 indikator, terdapat 129 indikator (65,15%) sudah tercapai, 49 indikator (24,75%) belum tercapai, 4 indikator (2,02%) belum dilaksanakan, dan 16 indikator (8,08%) belum ada data.

Capaian tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam pilar sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain:

TPB 1 Tanpa Kemiskinan dengan indikator Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dan mencapai 76,08

TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan indikator:

1. *Total Fertility Rate* (TFR) tercapai 1,85
2. *Unmet need* pelayanan kesehatan tercapai 9,13

TPB 5 Kesetaraan Gender dengan indikator:

1. Proporsi perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun tercapai 0,39
2. Proporsi perempuan umur 15- 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi tercapai 76,08
3. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern tercapai 76,08

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Koa Semarang sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Disdalduk KB	Permasalahan Disdalduk KB	Isu KLHS yang Relevan Dengan Disdalduk KB	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Disdalduk KB			Isu Strategis Disdalduk KB
			Global	Nasional	Regional	
• **Jumlah penduduk besar dan beragam** → menjadi peluang pengendalian pertumbuhan dan peningkatan kualitas SDM. • **Fasilitas kesehatan memadai** (RS, Puskesmas, klinik, bidan) → mendukung akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. • **Kekuatan kader dan lembaga masyarakat** (PKK, Posyandu, kelompok binaan) → memperkuat KIE dan partisipasi KB. • **Dukungan dunia pendidikan dan perguruan tinggi** → basis pengembangan program GenRe dan edukasi remaja. • **Peran swasta dan dunia usaha** → peluang program KB berbasis tempat kerja dan dukungan CSR. • **Pemanfaatan teknologi informasi** → mempercepat digitalisasi layanan KB dan sistem informasi keluarga.	• Sinkronisasi dan pemetaan pengendalian penduduk belum optimal. • Sistem informasi pengendalian penduduk belum berjalan baik. • KIE Program Bangga Kencana belum efektif. • Kompetensi Penyuluh KB stagnan. • Peran organisasi masyarakat dalam advokasi dan pelayanan KB masih rendah. • Kepesertaan KB stagnan/menurun • Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi belum sesuai kebutuhan. • Jaminan pelayanan KB belum optimal. • Pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga (balita, lansia, remaja) belum maksimal. • Pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih lemah. • Pelaksanaan program, kegiatan, dan pelaporan kinerja belum sesuai aturan. • Administrasi dan pelaporan keuangan belum optimal. • Layanan kepegawaian untuk peningkatan kapasitas aparatur masih terbatas. • Administrasi umum dan sarpras kantor belum memadai. • Pengelolaan kebutuhan Barang Milik Daerah belum maksimal.	• Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	• Demografi Global • Urbanisasai Dunia	• Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	• Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	• Tingginya laju pertumbuhan penduduk • Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata • Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga • Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Disdalduk KB	Permasalahan Disdalduk KB	Isu KLHS yang Relevan Dengan Disdalduk KB	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Disdalduk KB			Isu Strategis Disdalduk KB
			Global	Nasional	Regional	
	• Kebutuhan jasa penunjang untuk menindaklanjuti aduan masyarakat belum terpenuhi. • Pemeliharaan aset/barang milik daerah belum optimal.					

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
   Pertumbuhan penduduk Kota Semarang yang tinggi menimbulkan beban terhadap ketersediaan lapangan kerja, kebutuhan perumahan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana perkotaan. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat memperbesar angka ketimpangan dan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian melalui program kependudukan yang terencana, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata
   Pelayanan KB masih menghadapi kendala pemerataan, terutama di wilayah pinggiran kota dan kelompok masyarakat kurang mampu. Ketersediaan tenaga penyuluh, alat, dan obat kontrasepsi juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, peningkatan akses dan kualitas layanan KB menjadi sangat penting agar semua keluarga memperoleh pelayanan yang aman, terjangkau, dan bermutu guna mendukung terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera.

3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
   Remaja sebagai generasi penerus bangsa masih menghadapi rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, risiko pernikahan usia dini, serta pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga. Kurangnya informasi yang benar dan komprehensif membuat remaja rentan terhadap masalah kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, hingga putus sekolah. Oleh karena itu, edukasi, komunikasi, informasi, dan konseling yang tepat perlu diperkuat agar remaja lebih siap dalam membangun keluarga di masa depan.

4. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
   Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menentukan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Namun, banyak keluarga masih menghadapi tantangan dalam aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keharmonisan. Untuk itu, pembangunan keluarga harus difokuskan pada pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok bina keluarga balita, remaja, lansia, maupun kegiatan pendampingan keluarga lainnya. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan keluarga berkualitas, mandiri, dan harmonis sebagai fondasi pembangunan Kota Semarang

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang kesehatan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah :

"**Meningkatnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang"**.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk;
2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga;
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan											
	Meningkatnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang										
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	66,58	67,56	68,54	69,52	70,50	71,20	
		Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk									
			Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2	2	2	2	2	2	
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga									
			Indeks kebahagiaan	Angka	75,98	76,00	76,20	76,50	76,75	77,00	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka	79,17	80,00	80,10	80,20	80,30	80,40	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka	89,00	89,25	89,50	89,75	90,00	90,25	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Ketahanan Keluarga untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Lingkungan Sehat	**Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Program Bangga Kencana untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Kota**	**Penguatan Infrastruktur Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Merata dan Inklusif**	**Pengembangan SDM Keluarga Unggul dan Berdaya Saing melalui Program Pengendalian Penduduk dan KB**	**Mewujudkan Keluarga Kota Semarang yang Sejahtera, Berkeadilan, Lestari, dan Inklusif melalui Program Bangga Kencana**
• Fokus utama diarahkan pada pengendalian pertumbuhan penduduk melalui penguatan layanan KB, peningkatan kesadaran perencanaan keluarga, serta pembinaan keluarga sehat. Upaya ini juga dipadukan dengan pembinaan ketahanan keluarga dalam pola konsumsi pangan bergizi, hidup sehat, dan perilaku ramah lingkungan untuk mendukung	• Fokus utama adalah pemberdayaan ekonomi keluarga melalui penguatan program Bangga Kencana yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pariwisata. Melalui kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) dan bina keluarga, masyarakat diarahkan untuk lebih produktif, sehingga keluarga tidak hanya mandiri dalam ekonomi tetapi juga mampu	• Fokus utama difokuskan pada penguatan infrastruktur pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi agar lebih merata, modern, dan inklusif. Hal ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan akses layanan berbasis digital, serta perluasan jangkauan pelayanan KB hingga kelompok rentan untuk memastikan tidak ada keluarga yang tertinggal	• Fokus utama diarahkan pada pengembangan SDM keluarga unggul dan berdaya saing dengan memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan. Melalui pendidikan keluarga, pembinaan remaja, parenting skill, serta peningkatan kapasitas kader dan tenaga lini lapangan, keluarga Kota Semarang diharapkan mampu	• Fokus utama adalah mewujudkan keluarga Kota Semarang yang sejahtera, berkeadilan, lestari, dan inklusif melalui penguatan program Bangga Kencana yang terintegrasi lintas sektor. Pada tahap ini, pembangunan keluarga difokuskan pada keberlanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara aspek kesejahteraan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ketahanan pangan dan lingkungan kota yang berkelanjutan.	mendukung potensi wisata dan produk unggulan Kota Semarang.	dalam memperoleh layanan dasar.	melahirkan generasi sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.	sosial, keadilan gender, kelestarian lingkungan, serta keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam pembangunan kota.

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang nyaman, cepat, dan mampu menciptakan kepuasan masyarakat, difokuskan pada :

1. Mengoptimalkan pemaduan dan sinkronisasi pengendalian penduduk
2. Mengoptimalkan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
3. Meningkatkan sistem informasi pengendalian penduduk
4. Mengefektifkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana
5. Meningkatkan kompetensi tenaga Penyuluh Keluarga Berencana
6. Mengoptimalkan advokasi dan penggerakan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
7. Meningkatkan kepesertaan KB
8. Menyediakan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan
9. Meningkatkan jaminan pelayanan KB
10. Mengoptimalkan kelompok Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia
11. Mengoptimalkan kelompok Bina Ketahanan Keluarga Remaja
12. Meningkatnya pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
13. penguatan data perencanaan dan evaluasi
14. penguatan administrasi keuangan dan pelaporan
15. peningkatan kapasistas SDM Aparatur

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat yang berkualitas,merata dan berkesinambungan	• Meningkatnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	• Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk • Meningkatnya kesejahteraan keluarga • Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Mengoptimalkan pengendalian penduduk • Mengoptimalkan Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencan • Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera • Mengoptimalkan pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Penguatan layanan kesehatan primer (Puskesmas) berbasis keluarga dan masyarakat. • Penambahan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah kurang terlayani. • Pengembangan program rehabilitasi terpadu bagi penyandang disabilitas dan lansia.	• Mengoptimalkan pemaduan dan sinkronisasi pengendalian penduduk • Mengoptimalkan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk • Meningkatkan sistem informasi pengendalian penduduk • Mengefektifkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana • Meningkatkan kompetensi tenaga Penyuluh Keluarga Berencana • Mengoptimalkan advokasi dan penggerakan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB • Meningkatkan kepesertaan KB • Menyediakan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan • Meningkatkan jaminan pelayanan KB • Mengoptimalkan kelompok Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia • Mengoptimalkan kelompok Bina Ketahanan Keluarga Remaja • Meningkatnya pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • penguatan data perencanaan dan evaluasi • penguatan administrasi keuangan dan pelaporan	

Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					• peningkatan kapasistas SDM Aparatur	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Tabel 4.1.
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan							
	Meningkatnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk			Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)		Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Terkendalinya angka kelahiran penduduk		*Age Specific Fertility Rate*/ASFR (15-19 tahun)	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
				Terlaksannaya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Subkoordinator Pemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Pelaksana (Staf) Pemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk
				Terlaksananya penyusunan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Jumlah dokumen profil kependudukan	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2.14.02.2.02.0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Pelaksana (Staf) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
				Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2.14.02.2.02.0027 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pelaksana (Staf) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
				Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2.14.02.2.02.0028 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pelaksana (Staf) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
				Tersedianya sistem informasi pengendalian penduduk	Persentase penyediaan data pada sistem informasi pengendalian penduduk		Subkoordinator Sistem Informasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
							Pengendalian Penduduk
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Pelaksana (Staf) Sistem Informasi Pengendalian Penduduk
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelaksana (Staf) Sistem Informasi Pengendalian Penduduk
				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pelaksana (Staf) Sistem Informasi Pengendalian Penduduk
			Menurunnya kehamilan tidak direncanakan		Persentase Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
				Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, KIE dalam 1 Tahun	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Subkoordinator Komunikasi, Informasi dan Edukasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksana (Staf) Komunikasi, Informasi dan Edukasi
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksana (Staf) Komunikasi, Informasi dan Edukasi
				Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB/PPKBD yang dibina	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
				Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pelaksana (Staf) Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pelaksana (Staf) Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Ketua Tim Kerja Advokasi dan Penggerakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksana (Staf) Advokasi dan Penggerakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pelaksana (Staf) Advokasi dan Penggerakan
			Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS)		*Demand satisfied*		Kepala Bidang Keluarga Berencana
				Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Kepesertaan Keluarga Berencana
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelaksana (Staf) Kepesertaan Keluarga Berencana
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pelaksana (Staf) Kepesertaan Keluarga Berencana
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Pelaksana (Staf) Kepesertaan Keluarga Berencana

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Menurunnya *unmet need* pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)		Ketua Tim Kerja Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
				Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Pelaksana (Staf) Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
				Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	2.14.03.2.03.0017 Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Pelaksana (Staf) Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
				Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terdistribusikannya alat dan obat kontrasepsi		Ketua Tim Kerja Alat dan Obat Kontrasepsi
				Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pelaksana (Staf) Alat dan Obat Kontrasepsi
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga			Indeks kebahagiaan		Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.		Indeks lansia berdaya	2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Indek Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Balita dan Lansia yang Dimiliki	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ketua Tim Kerja Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pelaksana (Staf) Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia
				Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pelaksana (Staf) Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pelaksana (Staf) Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pelaksana (Staf) Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia
				Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Remaja yang Dimiliki		Ketua Tim Kerja Bina Ketahanan Remaja
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Pelaksana (Staf) Bina Ketahanan Remaja

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pelaksana (Staf) Bina Ketahanan Remaja
				Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pelaksana (Staf) Bina Ketahanan Remaja
				Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pelaksana (Staf) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
				Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	2.14.04.2.02.0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Pelaksana (Staf) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas	2.14.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksana (Staf) Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Pelaksana (Staf) Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pelaksana (Staf) Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Pelaksana (Staf) Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Pelaksana (Staf) Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksana (Staf) Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.14.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pelaksana (Staf) Perencanaan dan Evaluasi
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksana (Staf) Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.14.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksana (Staf) Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksana (Staf) Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaksana (Staf) Keuangan dan Barang Milik Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pelaksana (Staf) Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaksana (Staf) Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.14.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.14.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.14.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selesai ditindaklanjuti	2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan	2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksana (Staf) Umum dan Kepegawaian

Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
Dalam Mendukung Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome Program	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	• Upaya penurunan stunting	• Terkendalinya angka kelahiran penduduk • Menurunnya kehamilan tidak direncanakan • Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh PUS • Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Data dan Informasi Keluarga • Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal • Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) • Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB • Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB • Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota • Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya • Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	

No	Program Prioritas	Outcome Program	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) • Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) • Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	• Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna	• Menurunnya kehamilan tidak direncanakan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB • Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
3	• Penyiapan *Support System* untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda	• Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
4	• Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan)	• Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh PUS	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome Program	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			• Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) • Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP • Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB • Peningkatan Kesertaan KB Pria	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Semarang Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				17.435.604.667,00		19.356.464.100,00		20.192.511.533,00		20.346.081.567,00		20.708.321.473,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.02 Program Pengendalian Penduduk				1.307.718.540,00		1.491.032.581,00		1.570.819.384,00		1.585.475.086,00		1.620.044.852,00	Bidang Dalduk
Terkendalinya angka kelahiran penduduk	*Age Specific Fertility Rate*/ASFR (15-19 tahun)	8,5	7,2	1.307.718.540,00	6,60	1.491.032.581,00	6,10	1.570.819.384,00	5,70	1.585.475.086,00	5,30	1.620.044.852,00	Bidang Dalduk
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00	Bidang Dalduk
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan	1 dokumen	1 dokumen	310.000.000,00	1 dokumen	310.000.000,00	1 dokumen	310.000.000,00	1 dokumen	310.000.000,00	1 dokumen	310.000.000,00	Bidang Dalduk
2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00	Bidang Dalduk
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	5 sekolah	8 seko88lah	310.000.000,00	12 sekolah	310.000.000,00	20 sekolah	310.000.000,00	30 sekolah	310.000.000,00	35 sekolah	310.000.000,00	Bidang Dalduk
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				997.718.540,00		1.181.032.581,00		1.260.819.384,00		1.275.475.086,00		1.310.044.852,00	Bidang Dalduk

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Terlaksananya penyusunan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Jumlah dokumen profil kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	371.250.000,00	1 Dokumen	371.250.000,00	1 Dokumen	371.250.000,00	1 Dokumen	371.250.000,00	1 Dokumen	371.250.000,00	Bidang Dalduk
2.14.02.2.02.0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				221.250.000,00	137 unit	221.250.000,00	167 unit	221.250.000,00	177 unit	221.250.000,00	177 unit	221.250.000,00	Bidang Dalduk
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	87 unit	107 unit	221.250.000,00	137 unit	221.250.000,00	167 unit	221.250.000,00	177 unit	221.250.000,00	177 unit	221.250.000,00	Bidang Dalduk
2.14.02.2.02.0027 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	Bidang Dalduk
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	Bidang Dalduk
2.14.02.2.02.0028 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	Bidang Dalduk
Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	1 dokumen	90.000.000,00	1 dokumen	90.000.000,00	1 dokumen	90.000.000,00	1 dokumen	90.000.000,00	1 dokumen	90.000.000,00	Bidang Dalduk
Tersedianya sistem informasi pengendalian penduduk	Persentase penyediaan data pada sistem informasi pengendalian penduduk	100 %	100 %	626.468.540,00	100 %	809.782.581,00	100 %	889.569.384,00	100 %	904.225.086,00	100 %	938.794.852,00	Bidang Dalduk
2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				145.500.000,00		145.500.000,00		225.286.803,00		145.500.000,00		145.500.000,00	Bidang Dalduk
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 dokumen	12 dokumen	145.500.000,00	12 dokumen	145.500.000,00	12 dokumen	225.286.803,00	12 dokumen	145.500.000,00	12 dokumen	145.500.000,00	Bidang Dalduk
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				452.168.540,00		635.482.581,00		635.482.581,00		729.925.086,00		764.494.852,00	Bidang Dalduk

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	12 laporan	452.168.540,00	12 laporan	635.482.581,00	12 laporan	635.482.581,00	12 laporan	729.925.086,00	12 laporan	764.494.852,00	Bidang Dalduk
2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				28.800.000,00		28.800.000,00		28.800.000,00		28.800.000,00		28.800.000,00	Bidang Dalduk
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	12 dokumen	28.800.000,00	12 dokumen	28.800.000,00	12 dokumen	28.800.000,00	12 dokumen	28.800.000,00	12 dokumen	28.800.000,00	Bidang Dalduk
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana				4.472.350.299,00		4.945.505.395,00		5.151.444.516,00		5.189.272.606,00		5.278.501.237,00	Bidang PP dan Bidang KB
Menurunnya kehamilan tidak direncanakan	Persentase Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	15 %	14.3 %	3.061.715.299,00	14 %	3.256.505.395,00	13.7 %	3.391.044.516,00	13.5 %	3.295.872.606,00	13.2 %	3.249.501.237,00	Bidang PP
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				358.370.400,00		394.207.220,00		433.628.184,00		476.991.002,00		524.690.102,00	Bidang PP
Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, KIE dalam 1 Tahun	16 Kegiatan	16 Kegiatan	358.370.400,00	16 Kegiatan	394.207.220,00	16 Kegiatan	433.628.184,00	16 Kegiatan	476.991.002,00	16 Kegiatan	524.690.102,00	Bidang PP
2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				160.000.000,00		165.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00	Bidang PP
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 laporan	10 laporan	160.000.000,00	10 laporan	165.000.000,00	10 laporan	180.000.000,00	10 laporan	200.000.000,00	10 laporan	225.000.000,00	Bidang PP
2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				198.370.400,00		229.207.220,00		253.628.184,00		276.991.002,00		299.690.102,00	Bidang PP
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	16 dokumen	16 dokumen	198.370.400,00	16 dokumen	229.207.220,00	16 dokumen	253.628.184,00	16 dokumen	276.991.002,00	16 dokumen	299.690.102,00	Bidang PP

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan												
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				656.941.028,00		722.635.130,00		794.898.642,00		582.390.514,00		640.629.565,00	Bidang PP
Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB/PPKBD yang dibina	221 Orang	221 Orang	656.941.028,00	221 Orang	722.635.130,00	221 Orang	794.898.642,00	221 Orang	582.390.514,00	221 Orang	640.629.565,00	Bidang PP
2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				169.424.552,00		186.367.007,00		205.003.707,00		225.504.078,00		248.054.486,00	Bidang PP
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi	7 Organisasi	169.424.552,00	8 Organisasi	186.367.007,00	9 Organisasi	205.003.707,00	10 Organisasi	225.504.078,00	11 Organisasi	248.054.486,00	Bidang PP
2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				487.516.476,00		536.268.123,00		589.894.935,00		356.886.436,00		392.575.079,00	Bidang PP
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 laporan	12 laporan	487.516.476,00	12 laporan	536.268.123,00	12 laporan	589.894.935,00	12 laporan	356.886.436,00	12 laporan	392.575.079,00	Bidang PP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2.046.403.871,00		2.139.663.045,00		2.162.517.690,00		2.236.491.090,00		2.084.181.570,00	Bidang PP
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	85.88 %	87 %	2.046.403.871,00	88 %	2.139.663.045,00	89 %	2.162.517.690,00	90 %	2.236.491.090,00	91 %	2.084.181.570,00	Bidang PP

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				1.841.200.000,00		1.841.200.000,00		1.841.200.000,00		1.841.200.000,00		1.841.200.000,00	Bidang PP
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	16 unit	16 unit	1.841.200.000,00	16 unit	1.841.200.000,00	16 unit	1.841.200.000,00	16 unit	1.841.200.000,00	16 unit	1.841.200.000,00	Bidang PP
2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				205.203.871,00		298.463.045,00		321.317.690,00		395.291.090,00		242.981.570,00	Bidang PP
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	6 Dokumen	12 dokumen	205.203.871,00	12 dokumen	298.463.045,00	12 dokumen	321.317.690,00	12 dokumen	395.291.090,00	12 dokumen	242.981.570,00	Bidang PP
Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh PUS	*Demand Satisfied*	77.4 %	77.6 %	1.410.635.000,00	77.7 %	1.689.000.000,00	77.8 %	1.760.400.000,00	77.9 %	1.893.400.000,00	78 %	2.029.000.000,00	Bidang KB
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1.410.635.000,00		1.689.000.000,00		1.760.400.000,00		1.893.400.000,00		2.029.000.000,00	Bidang KB
Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	77,49 %	77,76 %	1.090.350.000,00	77,77 %	1.353.000.000,00	77,78 %	1.409.000.000,00	77,9 %	1.524.000.000,00	77,91 %	1.640.000.000,00	Bidang KB
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				809.000.000,00		1.059.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00	Bidang KB
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5267 orang	4699 orang	809.000.000,00	4793 orang	1.059.000.000,00	4889 orang	1.100.000.000,00	4987 orang	1.200.000.000,00	5086 orang	1.300.000.000,00	Bidang KB
2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				208.350.000,00		218.000.000,00		229.000.000,00		240.000.000,00		252.000.000,00	Bidang KB
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	14 laporan	12 laporan	208.350.000,00	12 laporan	218.000.000,00	12 laporan	229.000.000,00	12 laporan	240.000.000,00	12 laporan	252.000.000,00	Bidang KB

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya												
2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria				73.000.000,00		76.000.000,00		80.000.000,00		84.000.000,00		88.000.000,00	Bidang KB
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	46 orang	30 orang	73.000.000,00	30 orang	76.000.000,00	30 orang	80.000.000,00	30 orang	84.000.000,00	30 orang	88.000.000,00	Bidang KB
Menurunnya *unmet need* pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	5,13 %	4,42 %	100.150.000	4,07 %	105.000.000	3,71 %	109.400.000	3,36 %	115.400.000	3,00 %	121.500.000	Bidang KB
2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				35.800.000,00		37.500.000,00		39.400.000,00		41.400.000,00		43.500.000,00	Bidang KB
Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 laporan	2 laporan	35.800.000,00	2 laporan	37.500.000,00	2 laporan	39.400.000,00	2 laporan	41.400.000,00	2 laporan	43.500.000,00	Bidang KB
2.14.03.2.03.0017 Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				64.350.000,00		67.500.000,00		70.000.000,00		74.000.000,00		78.000.000,00	Bidang KB
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	N/A	1 kegiatan	64.350.000,00	1 kegiatan	67.500.000,00	1 kegiatan	70.000.000,00	1 kegiatan	74.000.000,00	1 kegiatan	78.000.000,00	Bidang KB
Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terdistribusikannya alat dan obat kontrasepsi	100 %	100 %	220.135.000,00	100 %	231.000.000,00	100 %	242.000.000,00	100 %	254.000.000,00	100 %	267.500.000,00	Bidang KB
2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				220.135.000,00		231.000.000,00		242.000.000,00		254.000.000,00		267.500.000,00	Bidang KB
Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	22 unit	16 unit	220.135.000,00	16 unit	231.000.000,00	16 unit	242.000.000,00	16 unit	254.000.000,00	16 unit	267.500.000,00	Bidang KB
2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera				1.120.535.311,00		1.239.083.045,00		1.290.680.536,00		1.300.158.262,00		1.322.514.255,00	Bidang K3
Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	Indeks lansia berdaya	58.65	58,66	1.120.535.311,00	58,67	1.239.083.045,00	58,68	1.290.680.536,00	58,69	1.300.158.262,00	58,70	1.322.514.255,00	Bidang K3
	Indek Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	91,69	91,70		91,71		91,72		91,73		91,74		
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.024.535.311		1.140.083.045		1.188.680.536		1.198.158.262		1.216.514.255	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Balita dan Lansia yang Dimiliki	N/A	2 Kelembagaan	604.865.857	2 Kelembagaan	480.083.045,00	2 Kelembagaan	501.680.536,00	2 Kelembagaan	502.158.262,00	2 Kelembagaan	504.514.255,00	Bidang K3
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				27.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		32.000.000,00	Bidang K3
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 unit	10 unit	27.000.000,00	10 unit	30.000.000,00	10 unit	31.000.000,00	10 unit	31.000.000,00	10 unit	32.000.000,00	Bidang K3
2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				40.035.311,00		45.083.045,00		48.680.536,00		49.158.262,00		50.514.255,00	Bidang K3
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	N/A	40 orang	40.035.311,00	50 orang	45.083.045,00	60 orang	48.680.536,00	70 orang	49.158.262,00	80 orang	50.514.255,00	Bidang K3
2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				207.430.546,00		165.000.000,00		172.000.000,00		172.000.000,00		172.000.000,00	Bidang K3
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	4 laporan	12 laporan	207.430.546,00	12 laporan	165.000.000,00	12 laporan	172.000.000,00	12 laporan	172.000.000,00	12 laporan	172.000.000,00	Bidang K3
2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				330.400.000,00		240.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Bidang K3

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	N/A	500 orang	330.400.000,00	500 orang	240.000.000	500 orang	250.000.000	500 orang	250.000.000	500 orang	250.000.000	Bidang K3
Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Remaja yang Dimiliki	N/A	2 Kelembagaan	419.669.454	2 Kelembagaan	660.000.000	2 Kelembagaan	687.000.000	2 Kelembagaan	696.000.000	2 Kelembagaan	712.000.000	Bidang K3
2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	Bidang K3
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	N/A	40 keluarga	50.000.000,00	50 keluarga	60.000.000,00	60 keluarga	65.000.000,00	70 keluarga	65.000.000,00	80 keluarga	65.000.000,00	Bidang K3
2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				328.635.364,00		270.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		287.000.000,00	Bidang K3
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 laporan	12 laporan	328.635.364,00	12 laporan	270.000.000,00	12 laporan	282.000.000,00	12 laporan	282.000.000,00	12 laporan	287.000.000,00	Bidang K3
2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				41.034.090,00		330.000.000,00		340.000.000,00		349.000.000,00		360.000.000,00	Bidang K3
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga	N/A	10 kelompok	41.034.090,00	10 kelompok	330.000.000,00	10 kelompok	340.000.000,00	10 kelompok	349.000.000,00	10 kelompok	360.000.000,00	Bidang K3

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk												
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				96.000.000,00		99.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		106.000.000,00	Bidang K3
Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	N/A	7 Organisasi	96.000.000,00	7 Organisasi	99.000.000,00	7 Organisasi	102.000.000,00	7 Organisasi	102.000.000,00	7 Organisasi	106.000.000,00	Bidang K3
2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				71.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	Bidang K3
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	10 laporan	71.000.000,00	10 laporan	70.000.000,00	10 laporan	70.000.000,00	10 laporan	70.000.000,00	10 laporan	70.000.000,00	Bidang K3
2.14.04.2.02.0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				25.000.000,00		29.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		36.000.000,00	Bidang K3
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	6 laporan	12 laporan	25.000.000,00	12 laporan	29.000.000,00	12 laporan	32.000.000,00	12 laporan	32.000.000,00	12 laporan	36.000.000,00	Bidang K3
2.14.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.535.000.517,00		11.680.843.079,00		12.179.567.097,00		12.271.175.613,00		12.487.261.129,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas	100%	100%	10.535.000.517,00	100%	11.680.843.079,00	100%	12.179.567.097,00	100%	12.271.175.613,00	100%	12.487.261.129,00	Sekretariat
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.950.300,00		62.950.300,00		62.950.300,00		95.715.400,00		112.677.400,00	Sekretariat
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100 %	62.950.300,00	100 %	62.950.300,00	100 %	62.950.300,00	100 %	95.715.400,00	100 %	112.677.400,00	Sekretariat
2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.234.900,00		2.234.900,00		2.234.900,00		35.000.000,00		51.962.000,00	Sekretariat
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	2.234.900,00	3 dokumen	2.234.900,00	3 dokumen	2.234.900,00	4 dokumen	35.000.000,00	5 dokumen	51.962.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				2.234.900,00		2.234.900,00		2.234.900,00		2.234.900,00		2.234.900,00	Sekretariat
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.234.900,00	1 dokumen	2.234.900,00	1 dokumen	2.234.900,00	1 dokumen	2.234.900,00	1 dokumen	2.234.900,00	Sekretariat
2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.874.900,00		1.874.900,00		1.874.900,00		1.874.900,00		1.874.900,00	Sekretariat
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00	Sekretariat

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				2.234.900,00		2.234.900,00		2.234.900,00		2.234.900,00		2.234.900,00	Sekretariat
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.234.900,00	1 dokumen	2.234.900,00	1 dokumen	2.234.900,00	1 dokumen	2.234.900,00	1 dokumen	2.234.900,00	Sekretariat
2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD				1.874.900,00		1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00		1.874.900,00	Sekretariat
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00	1 dokumen	1.874.900,00	Sekretariat
2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				74.495.800,00		74.495.800,00		74.495.800,00		74.495.800,00		74.495.800,00	Sekretariat
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	74.495.800,00	4 laporan	74.495.800,00	4 laporan	74.495.800,00	4 laporan	74.495.800,00	4 laporan	74.495.800,00	Sekretariat
2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	Sekretariat
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	n/a	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.413.242.594,00		7.413.242.594,00		8.145.722.702,00		8.539.654.077,00		8.953.282.021,00	Sekretariat
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100 %	7.413.242.594,00	100 %	7.413.242.594,00	100 %	8.145.722.702,00	100 %	8.539.654.077,00	100 %	8.953.282.021,00	Sekretariat
2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.146.147.394,00		7.146.147.394,00		7.878.627.502,00		8.272.558.877,00		8.686.186.821,00	Sekretariat
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang / bulan	40 orang / bulan	7.146.147.394,00	40 orang / bulan	7.146.147.394,00	40 orang / bulan	7.878.627.502,00	40 orang / bulan	8.272.558.877,00	40 orang / bulan	8.686.186.821,00	Sekretariat
2.14.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				260.940.000,00		260.940.000,00		260.940.000,00		260.940.000,00		260.940.000,00	Sekretariat
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	12 dokumen	260.940.000,00	12 dokumen	260.940.000,00	12 dokumen	260.940.000,00	12 dokumen	260.940.000,00	12 dokumen	260.940.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.505.600,00		2.505.600,00		2.505.600,00		2.505.600,00		2.505.600,00	Sekretariat

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	2.505.600,00	12 dokumen	2.505.600,00	12 dokumen	2.505.600,00	12 dokumen	2.505.600,00	12 dokumen	2.505.600,00	Sekretariat
2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.044.000,00		1.044.000,00		1.044.000,00		1.044.000,00		1.044.000,00	Sekretariat
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1.044.000,00	1 laporan	1.044.000,00	1 laporan	1.044.000,00	1 laporan	1.044.000,00	1 laporan	1.044.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.505.600,00		2.505.600,00		2.505.600,00		2.505.600,00		2.505.600,00	Sekretariat
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	2.505.600,00	12 laporan	2.505.600,00	12 laporan	2.505.600,00	12 laporan	2.505.600,00	12 laporan	2.505.600,00	Sekretariat
2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	Sekretariat
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100.000,00	1 dokumen	100.000,00	1 dokumen	100.000,00	1 dokumen	100.000,00	1 dokumen	100.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000	Sekretariat
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	N/A	100 %	425.000.000	100 %	425.000.000	100 %	425.000.000	100 %	425.000.000	100 %	425.000.000	Sekretariat
2.14.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	Sekretariat
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	4 Dokumen	60.000.000,00	4 Dokumen	60.000.000,00	4 Dokumen	60.000.000,00	4 Dokumen	60.000.000,00	4 Dokumen	60.000.000,00	Sekretariat

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				293.000.000,00		293.000.000,00		293.000.000,00		293.000.000,00		293.000.000,00	Sekretariat
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	100 Orang	293.000.000,00	100 Orang	293.000.000,00	100 Orang	293.000.000,00	100 Orang	293.000.000,00	100 Orang	293.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				478.000.000,00		947.000.000,00		936.000.000,00		731.366.190,96		726.914.765,71	Sekretariat
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 %	100 %	478.000.000,00	100 %	947.000.000,00	100 %	936.000.000,00	100 %	731.366.190,96	100 %	726.914.765,71	Sekretariat
2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		20.000.000,00	Sekretariat
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	4 paket	15.000.000,00	4 paket	20.000.000,00	4 paket	20.000.000,00	4 paket	21.000.000,00	4 paket	20.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.000.000,00		26.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00	Sekretariat
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	4 paket	18.000.000,00	4 paket	26.000.000,00	4 paket	30.000.000,00	4 paket	31.000.000,00	4 paket	31.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00	Sekretariat
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	40.000.000,00	12 paket	55.000.000,00	12 paket	60.000.000,00	12 paket	62.000.000,00	12 paket	62.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000,00		90.000.000,00		115.000.000,00		116.000.000,00		120.000.000,00	Sekretariat
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	6 paket	80.000.000,00	6 paket	90.000.000,00	6 paket	115.000.000,00	6 paket	116.000.000,00	6 paket	120.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00	Sekretariat
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	35.000.000,00	12 paket	35.000.000,00	12 paket	36.000.000,00	12 paket	37.000.000,00	12 paket	38.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000,00		63.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	Sekretariat

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	40.000.000,00	12 laporan	63.000.000,00	12 laporan	65.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		358.000.000,00		360.000.000,00		344.366.190,96		325.914.765,71	Sekretariat
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	200.000.000,00	12 laporan	358.000.000,00	12 laporan	360.000.000,00	12 laporan	344.366.190,96	12 laporan	325.914.765,71	Sekretariat
2.14.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	Sekretariat
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000,00	4 dokumen	300.000.000,00	3 dokumen	250.000.000,00	2 dokumen	50.000.000,00	2 dokumen	60.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.000.000,00		320.000.000,00		350.000.000,00		90.000.000,00		50.000.000,00	Sekretariat
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 %	100 %	80.000.000,00	100 %	320.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	50.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000,00		320.000.000,00		350.000.000,00		90.000.000,00		50.000.000,00	Sekretariat
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	2 unit	80.000.000,00	5 unit	320.000.000,00	6 unit	350.000.000,00	2 unit	90.000.000,00	2 unit	50.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				992.966.186,20		1.053.614.495,51		1.094.745.220,29		1.113.939.945,04		1.084.886.942,29	Sekretariat
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selesai ditindaklanjuti	100 %	100 %	992.966.186,20	100 %	1.053.614.495,51	100 %	1.094.745.220,29	100 %	1.113.939.945,04	100 %	1.084.886.942,29	Sekretariat
2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.512.316,20		300.287.932,01		303.752.328,61		318.939.945,04		334.886.942,29	Sekretariat
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	275.512.316,20	12 laporan	300.287.932,01	12 laporan	303.752.328,61	12 laporan	318.939.945,04	12 laporan	334.886.942,29	Sekretariat
2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				717.453.870,00		753.326.563,50		790.992.891,68		795.000.000,00		750.000.000,00	Sekretariat

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Keterangan
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	717.453.870,00	12 laporan	753.326.563,50	12 laporan	790.992.891,68	12 laporan	795.000.000,00	12 laporan	750.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.082.841.436,80		1.459.035.689,49		1.165.148.874,71		1.275.500.000,00		1.134.500.000,00	Sekretariat
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan	100 %	100 %	1.082.841.436,80	100 %	1.459.035.689,49	100 %	1.165.148.874,71	100 %	1.275.500.000,00	100 %	1.134.500.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.603.603,00		41.583.783,15		43.662.972,31		43.500.000,00		44.500.000,00	Sekretariat
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	39.603.603,00	1 unit	41.583.783,15	1 unit	43.662.972,31	1 unit	43.500.000,00	1 unit	44.500.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				776.198.142,00		791.722.104,84		792.000.000,00		792.000.000,00		795.000.000,00	Sekretariat
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 unit	81 unit	776.198.142,00	81 unit	791.722.104,84	81 unit	792.000.000,00	81 unit	792.000.000,00	81 unit	795.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00	Sekretariat
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	133 unit	129 unit	75.000.000,00	139 unit	85.000.000,00	135 unit	90.000.000,00	135,00	90.000.000,00	138,00	95.000.000,00	Sekretariat
2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				192.039.691,80		540.729.801,50		239.485.902,40		350.000.000,00		200.000.000,00	Sekretariat
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3 unit	192.039.691,80	7 unit	540.729.801,50	5 unit	239.485.902,40	5 unit	350.000.000,00	5 unit	200.000.000,00	Sekretariat

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	66,58	67,56	68,54	69,52	70,50	71,20	
2	*Total Fertility Rate* (TFR)	Angka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
3	Indeks kebahagiaan	Angka	75,98	76,00	76,20	76,50	76,75	77,00	

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*Total Fertility Rate* (TFR)	Angka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	4,78	4,42	4,07	3,71	3,36	3,00	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (m*odern Contraceptive Prevalence Rate*/ mCPR)	%	77,74	77,76	77,77	77,78	77,90	77,91	

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

BAB V
PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Semarang Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdalduk KB setiap tahun selama periode 2025–2029 dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Disdalduk KB adalah sebagai berikut:

1. Seluruh bidang dan subbagian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang wajib mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan sesuai urusan kewenangannya secara optimal dan akuntabel.
2. Setiap aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang diharapkan menjalin sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang kuat antar bidang dan dengan pemangku kepentingan lintas sektor guna menjamin keterpaduan pelaksanaan program dalam bidang keluarga berencana.
3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas setiap tahunnya untuk kurun waktu 2025–2029. Penyusunan Renja wajib mengacu dan konsisten terhadap arah kebijakan, strategi, sasaran, dan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra.
4. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan dilakukan secara berkala untuk mengukur capaian, efektivitas kebijakan, serta sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan Renstra guna memastikan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan program.
5. Jika terjadi perubahan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, maka perubahan Renstra dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kota Semarang. Pelaksanaannya diharapkan dilakukan dengan dedikasi, profesionalisme, serta semangat pelayanan dan pengabdian oleh seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025–2029 mengikuti masa berlaku RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029. Dokumen Renstra ini juga dapat menjadi pedoman sementara dalam penyusunan Renja Tahun 2030, sebelum ditetapkannya Renstra periode berikutnya, guna memastikan kesinambungan arah kebijakan dan program pelayanan kepada masyarakat.

17. DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang maka Dinas Perhubungan Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang perhubungan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Perhubungan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PEERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir;
b) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
d) Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
e) Penyelenggaraan kerja sama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
f) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
g) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
h) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
i) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
j) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang

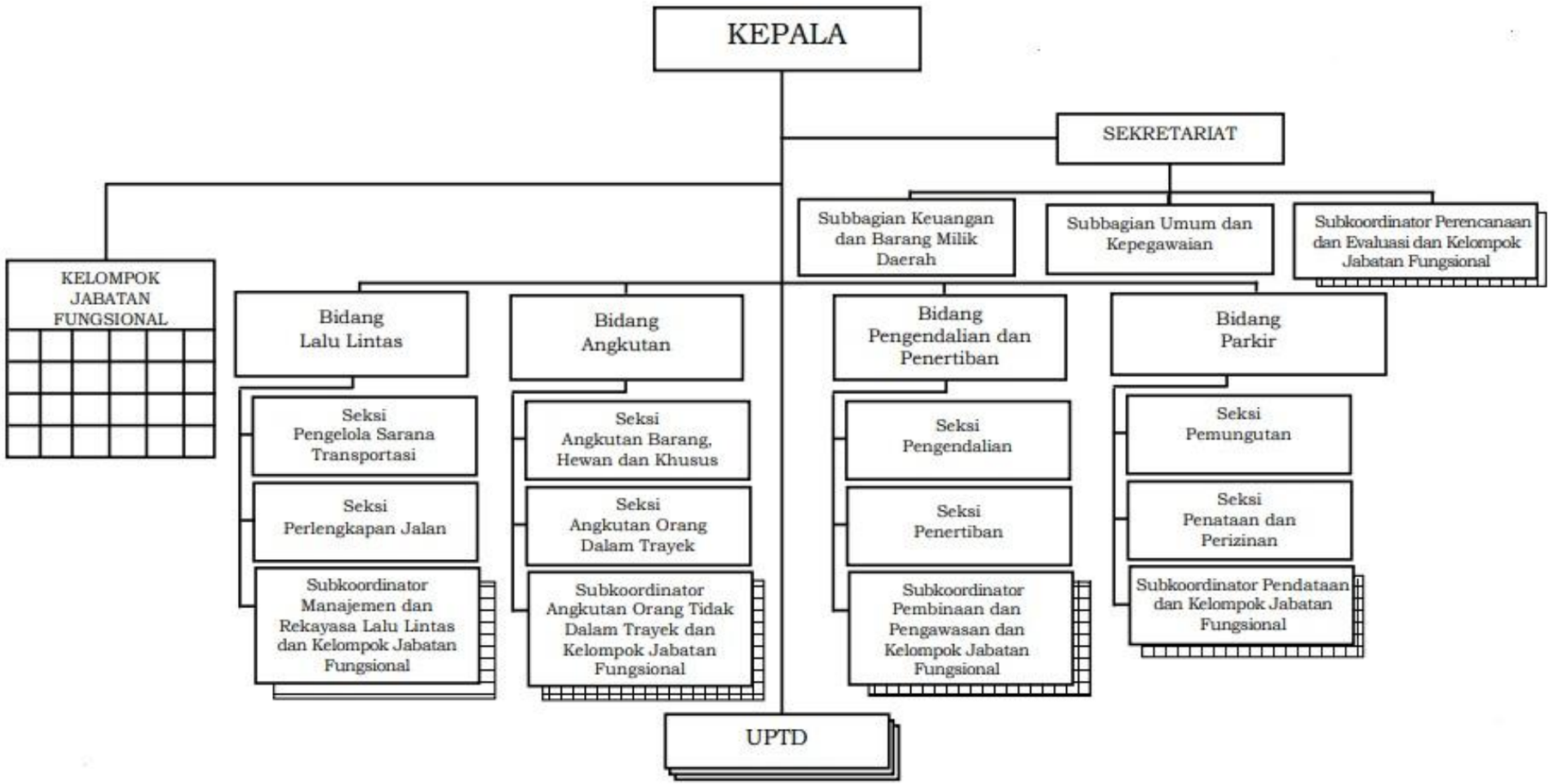

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
   Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Sekretariat
   Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.
   Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD.
   Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunya fungsi:
   a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
   d. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
   e. pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait;
   f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Dinas;
   g. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
   h. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
   i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
   j. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
   k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;

l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
m. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
n. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
p. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
r. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
s. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
t. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
v. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
w. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
x. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
z. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:
a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi.

3. Bidang Lalu-Lintas

Bidang Lalu Lintas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Lalu Lintas;
e. pelaksanaan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor;

f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
g. pelaksanaan kegiatan kajian teknis pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
h. pelaksanaan kegiatan penelitian, pemeriksaan dan pelaporan kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan;
i. pelaksanaan kegiatan penentuan atau penetapan lokasi, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan yang meliputi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman, Paku Jalan, Delinator, Shelter, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan, dan fasilitas pendukung;
j. pelaksanaan kegiatan penentuan lokasi, pemasangan, penetapan;
k. pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan perlintasan sebidang;
l. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kajian, penilaian dan pemberian rekomendasi terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas;
m. pelaksanaan kegiatan penetapan pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan;
n. pelaksanaan kegiatan penetapan pengaturan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki;
o. pelaksanaan kegiatan kajian rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
p. pelaksanaan kegiatan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam kota;
q. pelaksanaan kegiatan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun Terminal tipe C;
r. pelaksanaan kegiatan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
s. pelaksanaan kegiatan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan untuk pelabuhan sungai dan danau;
t. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
u. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
v. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
w. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
x. pelaksanaan kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian kota;
y. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam kota;
z. pelaksanaan kegiatan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam kota;

aa. pelaksanaan kegiatan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota;
bb. pelaksanaan kegiatan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kota;
cc. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kota;
dd. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Lalu Lintas;
ee. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Lalu Lintas;
ff. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas; dan
gg. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas terdiri atas:
a. Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi;
b. Seksi Perlengkapan Jalan; dan
c. Subkoordinator Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

4. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan berkedudukan di bawah dan bertangging jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Angkutan mempunyai fungsi:
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Lalu Lintas;
e. pelaksanaan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
g. pelaksanaan kegiatan kajian teknis pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
h. pelaksanaan kegiatan penelitian, pemeriksaan dan pelaporan kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan;
i. pelaksanaan kegiatan penentuan atau penetapan lokasi, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan yang meliputi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman, Paku Jalan, Delinator, Shelter, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan, dan fasilitas pendukung;
j. pelaksanaan kegiatan penentuan lokasi, pemasangan, penetapan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan perlintasan sebidang;
k. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kajian, penilaian dan pemberian rekomendasi terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas;

l. pelaksanaan kegiatan penetapan pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan;
m. pelaksanaan kegiatan penetapan pengaturan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki;
n. pelaksanaan kegiatan kajian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;
o. pelaksanaan kegiatan kajian rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
p. pelaksanaan kegiatan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam kota;
q. pelaksanaan kegiatan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun Terminal tipe C;
r. pelaksanaan kegiatan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
s. pelaksanaan kegiatan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan untuk pelabuhan sungai dan danau;
t. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
u. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
v. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
w. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
x. pelaksanaan kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian kota;
y. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam kota;
z. pelaksanaan kegiatan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam kota;
aa. pelaksanaan kegiatan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota;
bb. pelaksanaan kegiatan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kota;
cc. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kota;
dd. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Lalu Lintas;
ee. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Lalu Lintas;
ff. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas; dan
gg. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan terdiri atas:
a. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; dan
b. Seksi Angkutan Orang dalam Trayek;

c. Subkoordinaor Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

5. Bidang Pengendalian dan Penertiban

Bidang Pengendalian dan Penertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pengendalian dan Penertiban;
e. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan kota;
f. pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi bangunan tinggi yang berpengaruh pada lalu lintas penerbangan;
g. pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
h. pelaksanaan kegiatan kajian teknis pemberian rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan;
i. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
j. pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
k. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
l. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
m. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
n. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
o. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan;
p. pelaksanaan kegiatan pengawasan, penertiban dan penyidikan pelanggaran Perda bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, dan perizinan angkutan umum;
q. pelaksanaan kegiatan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran pengelolaan perparkiran meliputi juru parkir, petugas parkir, sarana prasarana, sistem dan prosedur Perizinan, pengelola parkir, penyelenggara parkir swasta dan sistem pemungutan retribusi;
r. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan petugas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;

s. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat pengguna jalan umum;
t. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengemudi angkutan umum;
u. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pengendalian dan Penertiban;
v. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pengendalian dan Penertiban;
w. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pengendalian dan Penertiban; dan
x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian dan Penertiban, terdiri atas:
a. Seksi Pengendalian;
b. Seksi Penertiban; dan
c. Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan

6. Bidang Parkir

Bidang Parkir berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalu Sekretaris. Bidang Parkir dipimpin oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Parkir mempunyai fungsi:
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Parkir;
e. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
f. pelaksanaan kegiatan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
g. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan pengelolaan parkir;
h. pelaksanaan kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
i. pelaksanaan kegiatan pengaturan tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah daerah, lokasi dan gedung parkir milik pemerintah daerah;
j. pelaksanaan kegiatan pendataan juru parkir, lahan dan potensi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus;
k. pelaksanaan kegiatan penentuan dan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum meliputi parkir umum dan parkir khusus;
l. pelaksanaan kegiatan pengembangan terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur Perizinan penyelenggaraan, pemungutan retribusi dan penataan ketertiban parkir;
m. pelaksanaan kegiatan kajian pendataan dan pengelolaan perparkiran;
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Parkir;

o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Parkir;
p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Parkir; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Parkir terdiri atas:
a. Seksi Pemungutan;
b. Seksi Penataan dan Perizinan; dan
c. Subkoordinator Pendataan.

7. UPTD
UPTD melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertenti. Pembentukan UPTD diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.
8. Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Perhubungan Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam kualifikasi pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non PNS		Kary. BLU		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	SD			2		1		7	1	11
2	SMP Sederajat	2		3		1		24	4	34
3	SMA Sederajat	22		80	8	23		706	268	1107
4	D1							2		2
5	D2	3								3
6	D3	9	2	3	1			49	16	80
7	D4							4	1	5
8	S1	25	10	24	8	2	2	116	64	251
9	S2	7	1					1	2	11
	Jumlah	68	13	112	17	27	2	909	356	1504

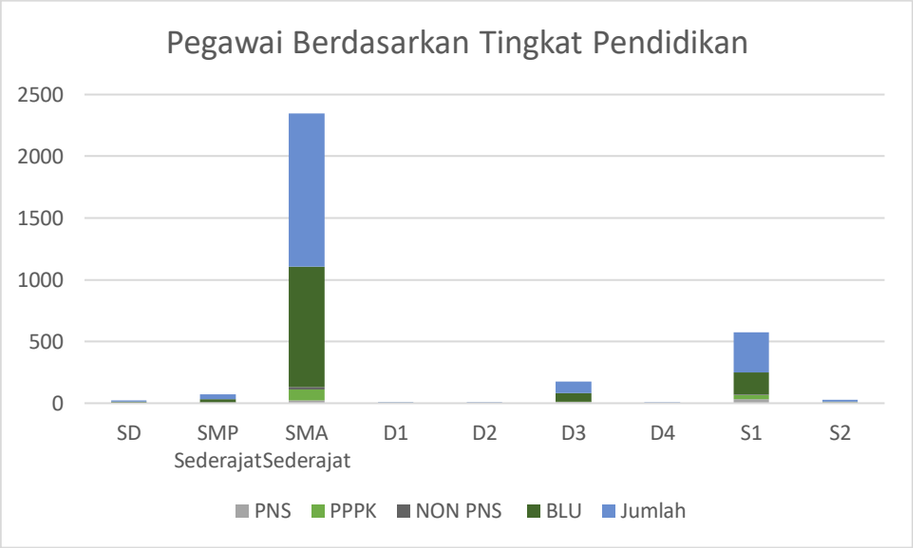

Dari jumlah pegawai sebanyak 1.504 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahin 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kary. BLU	909	356	1265
2	Non ASN / TPHL	27	2	29
3	Golongan II	113	11	124
4	Golongan III	60	18	78
5	Golongan IV	7	1	8
	Jumlah	1.118	388	1.504

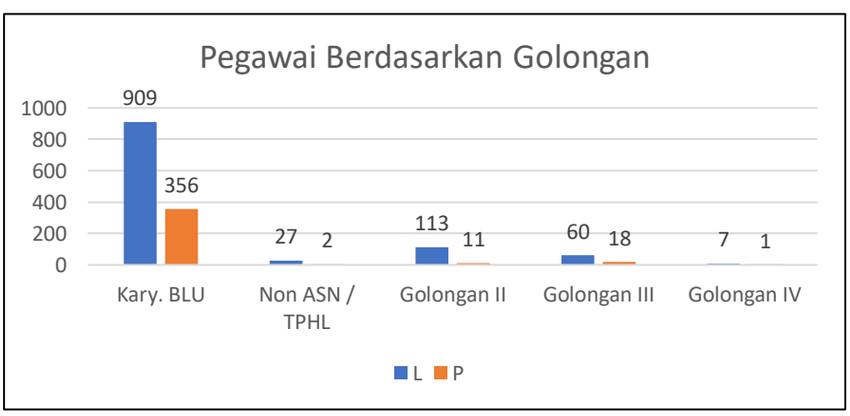

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perhubungan Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Aset Tanah Dinas Perhubungan Kota Semarang

No	Nama Barang	Lokasi	Luas	Nilai
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	Jl. Brigjen Sudiarto Km. 11	984,73	776.600.630
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	Jl. Raya Cangkiran	1.362	717.900.000
3	Tanah Bangunan Terminal Darat	Jl. Raya Gn Pati	1.777	3.048.000.000
4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Jl. Raya Semarang - Demak	51.400	26.372.000.000
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tambak Aji Raya No. 5 Semarang	20.032	9.014.400.000
6	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Kel. Cangkiran kec. Mijen	1.215	150.000.000
7	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Jl. Dr. Sutomo Kel.Randusari Kec.Smrg Selatan	1.139	624.694.540
			Jumlah	40.703.595.170

Tabel 2. 4 Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan Kota Semarang

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	*2*	*3*	*4*
1	Alat besar	25	4.855.899.371,00
2	Komputer	403	7.653.219.466,00
3	Alat eksplorasi	10	244.681.300,00
4	Alat keselamatan kerja	5	381.340.000,00
5	Rambu – rambu	119	10.175.929.063,00
6	Alat angkutan	142	32.819.680.376,00
7	Alat bengkel dan alat ukur	280	7.516.280.059,00
8	Alat pertanian	80	223.579.047,00
9	Alat kantor dan rumah tangga	1.330	13.206.347.699,00
10	Alat studio, komunikasi dan pemancar	1.195	23.609.880.343,00
11	Alat kedokteran dan kesehatan	217	1.618.694.053,00
12	Alat laboratorium	186	12.343.825.666,00
13	Alat persenjataan	155	1.549.474.560,00
		Jumlah	116.198.831.003,00

Tabel 2. 5 Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan Kota Semarang

No	Nama Barang	Lokasi	Luas	Nilai
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Tambak Aji Raya No 5	30	197.308.239,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Raya semarang - demak	159	1.174.442.745,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	655,27	4.670.613.724,00
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Tambak aji raya no.5	155	491.905.463,00
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Tambak aji raya no.5 semarang	104	877.148.667,00

No	Nama Barang	Lokasi	Luas	Nilai
1	*2*	*3*	*4*	*5*
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl.Tambak Aji Raya No.5 Semarang	31	193.786.700,00
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl Tambakaji Raya No.5 Semarang		1.073.480.148,00
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Raya gunung pati	358,95	133.661.965,00
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	29	189.144.469,00
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	35	198.256.900,00
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Tambak aji raya no.5 semarang	20	121.353.600,00
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl.tambak aji raya no. 5 semarang	1.012,50	4.658.389.407,00
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Jl. Raya semarang - demak	120	420.625.964,00
14	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Jl. Raya gunung pati	562,75	121.879.955,00
15	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Jl. Raya semarang - demak	7,33	2.183.441.700,00
16	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	Jl. Raya gunung pati	140,8	129.775.389,00
17	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Jl. Raya semarang - demak	57	289.485.162,00
18	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Jl. Raya semarang - demak	30	207.869.424,00
19	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Raya gunung pati	90,2	578.086.475,00
20	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Raya semarang - demak	143	1.085.072.382,00
21	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	150	211.730.000,00
22	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	Jl. Raya gunung pati	18	51.647.984,00
23	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Jl. Raya semarang - demak	403	4.772.620.542,00
24	Gedung Pos Jaga Permanen	Jl.Raya Semarang - Demak	36	538.119.554,00
25	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Jl. Pandanaran semarang	100	98.422.500,00
26	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Jl. Raya semarang-demak		197.653.000,00
27	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Jl Raya Terminal Cangkiran Semarang	1.267	4.615.179.100,00
28	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Terminal Gunungpati	3.371	4.534.587.700,00
29	Bangunan Halte/Shelter	Jl. Tambak aji raya no 5 semarang	58,48	712.449.933,00

No	Nama Barang	Lokasi	Luas	Nilai
1	*2*	*3*	*4*	*5*
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Tambak aji raya no. 5	100	98.000.000,00
31	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	114	96.470.000,00
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	135	96.085.000,00
33	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	465	1.292.648.985,00
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Tambak aji raya no.5 semarang	30	180.727.500,00
35	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Tambak ajj raya no. 5 semarang	648	1.654.844.698,00
36	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	487,5	428.368.000,00
37	Bangunan Tempat Parkir	Jl. Raya semarang - demak	25	151.327.500,00
38	Bangunan Tempat Parkir	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	30	180.627.500,00
39	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Jl. Raya semarang - demak	410	1.529.341.420,00
40	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Jl. Raya semarang demak	4.034	4.657.474.579,00
41	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Jl. Raya gunung pati	793,34	174.457.749,00
42	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	jl. Raya gunung pati	1.489	1.042.308.370,00
43	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Jl. Raya gunungpati - semarang	1.500	151.465.000,00
44	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Jl. Raya semarang - demak	35.396	40.973.775.084,00
45	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Jl. Tambak aji raya no.5 semarang	35	198.576.000,00
46	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	Jl. Pandanaran semarang	5,47	23.911.747.662,00
47	Bangunan Stasiun Semi Permanen	Jl. Tambakaji raya no.5 semarang		1.026.462.600,00
48	Motel Permanen	Jl. Raya semarang - demak	681	3.144.129.570,00
49	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	304,5	506.281.650,00
50	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	Jl. Tambak aji raya no. 5 semarang	100	246.035.300,00
51	Pilar/tugu/tanda lainnya	Jl. Tamba aji raya no. 5 semarang	115	169.771.000,00
52	Pagar Permanen	Jl Raya Gunungpati Semarang	45	130.771.000,00
53	Pagar Permanen	Jl Tambak Aji Raya No.5 Semarang	53,3	565.340.560,00
54	Pagar Permanen	Jl. Raya gunung pati	258	277.449.521,00

No	Nama Barang	Lokasi	Luas	Nilai
1	*2*	*3*	*4*	*5*
55	Pagar Permanen	Jl. Raya gunungpati semarang	70	194.420.000,00
56	Pagar Permanen	Jl. Raya semarang - demak	870	3.420.731.056,00
57	Tugu/tanda batas lainnya	Jl. Tambak aji raya no. 5 semrang	115	166.618.205,00
			Jumlah	121.394.394.300

Tabel 2. 6 Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Perhubungan Kota Semarang

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas	Nilai
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Jalan Kabupaten Lain-lain	Jl. Raya Cangkiran Semarang	1	4.688.626.000
2	Jalan Kabupaten Lain-lain	Jl. Raya Gunungpati	1	1.516.008.000
3	Jalan Kabupaten Lain-lain	Semarang	1	339.121.000
4	Jalan Khusus Kompleks	Jl. Raya semarang - demak	1	1.257.594.162
5	Jalan Khusus Perorangan	Jl. Raya gunung pati	117	243.866.035
6	Jembatan Pada Jalan Propinsi Arteri	Jl. Raya gunung pati	735	143.523.450
7	Jembatan Pada Jalan Propinsi Arteri	Jl. Raya semarang - demak	15	776.548.809
8	Jembatan Penyeberangan Orang	Jl. Bridjend Katamso (Depan SMP N 2 Semarang)		949.101.754
9	Jembatan Penyeberangan Orang	Jl. Jenderal Ahmad Yani (Depan RM. Citro Bundo)		906.676.273
10	Jembatan Penyeberangan Orang	Jl. Jendral Ahmad Yani (Depan BRI)		949.101.754
11	Jembatan Penyeberangan Orang	Jl. Pandanaran semarang	252	7.324.389.304
12	Jembatan Penyeberangan Orang	Jl. Pemuda (depan Hotel Dibya Puri)		1.250.000.000
13	Jembatan Penyeberangan Orang	Semarang	1	2.073.259.000
14	Saluran Penyimpan Air	Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Semarang	3	30.000.000
15	Sumur Artetis	Jl. Raya Semarang - Demak	1	180.329.000
16	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum		18	254.589.425
17	Saluran Pengumpul Air Hujan	Jl. Raya semarang - demak	990	2.170.347.465
18	Sumur Gali (SGL)	Jl. Raya gunung pati	120	361.612.577
19	Instalasi air kotor lainnya	Jl. Tambak aji raya no.5 semarang		33.662.927
20	Instalasi air kotor lainnya	Jl. Tambak Aji Raya No.5 Semarang		192.632.000

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas	Nilai
1	*2*	*3*	*4*	*5*
21	Instalasi PLTB Kapasitas Kecil	Jl. Raya Semarang - Demak	1	40.720.000
22	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Simpang Hanoman	3	22.142.500
23	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Simpang Mataram - Tugu	3	22.142.500
24	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Simpang Pandanaran - Thamrin	3	22.142.500
25	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Simpang Suharti	3	22.142.500
26	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Simpang Thamrin - Kampungkali	3	44.285.000
27	Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer	Jl. Raya Gunungpati	1	4.000.000
28	Instalasi Komputer	Jl. Tambak aji raya no.5 semarang		29.370.000
29	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain			971.500.000
30	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Semarang		387.331.000
31	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	Semarang	1	2.200.000
32	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Jl. Raya Semarang - Demak	1	5.635.000
33	Jaringan listrik lainnya	Jl Tambak Aji Raya No 5 Semarang		193.911.450
34	Jaringan listrik lainnya	Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Semarang		2.365.174.731
35	Jaringan listrik lainnya	Jl. Tambak aji raya no.5 semarang		160.625.000
36	Jaringan listrik lainnya	Jl. Tambak Aji Raya No.5 Semarang		21.800.000
37	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Semarang	1	2.700.000
			Jumlah	29.958.811.116

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Perhubungan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK / SPM / NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
A	Indikator Sasaran RPJMD																	
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,60	0,67	0,69	0,5761	0,5818	0,5876	0,5765	0,5428	0,85	0,85	0,88	86,04%	78,67%	147,54%	146,10%	149,76%
2	Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	Jumlah	0	3	3	3	3	2	3	4	3	3	1	100,00%	133,33%	100%	100%	50%
A	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perhubungan																	
1	Kinerja lalu lintas	Rasio	0,67	0,5	0,5	0,55	0,58	0,61	0,5	0,5	0,54	0,52	0,53	100,00%	100,00%	102%	110%	113%
2	Konektivitas Kota	Rasio	0,60	0,67	0,69	0,5761	0,5818	0,5876	0,5765	0,5428	0,58	0,92	0,88	86,04%	78,67%	100%	158,62%	149,15%
3	Persentase sarpras transportasi terpasang	%	78,27	62,93	65	62,96	64,22	65,51	63,13	65,09	67,71	69,32	71,99	100,32%	100,14%	107,54%	107,94%	110%
4	Nilai AKIP	Nilai	70	65	62	66	67	68	65,39	62,19	68,41	71,5	73,6	100,60%	100,31%	103,65%	106,72%	108,24%
B	Indikator Keberhasilan Daerah (IKD)																	
1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	17.611.420	30.558.520	33.051.055	13.231.720	14.554.892	16.010.382	10.935.306	8.425.337	22.956.716	22.956.716	22.308.400	35,78%	25,49%	173,50%	157,73%	139,33%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK / SPM / NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan	0	3	3	3	3	2	3	4	3	3	1	100,00%	133,33%	100%	100%	150%
3.	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	2030	5279	5279	1951	1970	1.990	5.073	4.578	2.026	2199	1.129	96,10%	86,72%	103,84%	111,62%	56,73%
4.	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,60	0,67	0,69	0,5761	0,5818	0,5876	0,5765	0,5428	0,92	0,85	0,88	86,04%	78,67%	159,69%	146,10%	149,76%
C	Indikator Program Dinas Perhubungan																	
1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	78,27	62,93	65	62,96	64,22	65,51	63,13	65,09	67,71	69,32	71,99	100,32%	100,14%	107,54%	107,94%	110%
2	Persentase pengelolaan Parkir On the Street	%	94	80,63	90	86	88	90	83,42	90,05	86,42	90,06	90,04	103,46%	100,06%	100,49%	102,34%	100,04%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK / SPM / NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
3	Jml trayek BRT	Jumlah	15	11	12	12	13	14	11	11	12	13	13	100,00%	91,67%	100,00%	100,00%	92,86%
4	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	%	30	n/a	n/a	34	33	32	n/a	n/a	33,98	31,68	33,51	n/a	n/a	100,06%	104,00%	95,28%
5	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah pendudu	%	7,01	n/a	n/a	7	6,81	6,87	n/a	n/a	5,48	5,23	5,51	n/a	n/a	78,29%	76,80%	80,20%
6	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Persentase tersediannya sarana dan prasaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK / SPM / NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	a Dinas Perhubungan																	
9	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**191.453.734.175**	**255.918.445.221**	**300.472.122.780**	**322.397.350.698**	**324.626.601.989**	**187.112.156.271**	**227.979.562.586**	**280.347.335.169**	**307.320.515.054**	**309.152.213.587**	**0,98**	**0,89**	**0,93**	**0,95**	**0,95**	**0,15**	**0,14**
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**30.022.361.175**	**65.554.617.605**	**65.554.617.605**	**75.254.259.695**	**67.966.012.055**	**28.670.014.844**	**47.180.969.249**	**58.986.159.838**	**66.474.880.111**	**61.388.207.058**	**0,95**	**0,72**	**0,90**	**0,88**	**0,90**	**0,31**	**0,24**
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**26.380.000**	**56.803.650**	**35.733.338**	**45.537.020**	**84.444.100**	**25.940.000**	**32.954.950**	**31.920.000**	**44.660.250**	**74.598.543**	**0,98**	**0,58**	**0,89**	**0,98**	**0,88**	**0,48**	**0,33**
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.300.000	31.377.260	4.637.086	13.987.800	38.746.400	4.200.000	17.103.000	4.560.000	13.889.750	36.795.305	0,98	0,55	0,98	0,99	0,95	2,31	1,51
2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.680.000	2.793.960	5.254.735	5.424.510	4.037.900	7.590.000	2.132.500	4.560.000	5.283.500	3.000.000	0,99	0,76	0,87	0,97	0,74	0,01	0,04

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.021.250	5.386.308	5.620.420	4.257.400	-	1.361.250	4.560.000	5.368.500	3.000.000	-	0,67	0,85	0,96	0,70	0,37	0,52
2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.021.250	5.254.735	5.424.510	4.037.900		1.361.250	4.560.000	5.246.000	3.000.000	-	0,67	0,87	0,97	0,74	0,34	0,52
2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		2.021.250	5.662.038	5.620.420	4.257.400		1.361.250	4.560.000	5.530.500	3.000.000	-	0,67	0,81	0,98	0,70	0,39	0,53
2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.400.000	-	9.635.700	4.705.760	4.723.800	14.150.000	-	4.560.000	4.643.500	3.000.000	0,98	-	0,47	0,99	0,64	-0,38	-0,33
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.568.680	4.813.600	4.753.600	24.383.300		9.635.700	4.560.000	4.698.500	22.803.238	-	0,58	0,95	0,99	0,94	0,85	0,84
2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata											-	-	-	-	-	0,00	0,00

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Pendukung Statistik Sektoral Daerah																	
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**567.480.000**	**16.563.327.585**	**14.949.877.767**	**14.176.632.271**	**13.063.463.400**	**537.570.000**	**15.811.594.277**	**13.807.947.977**	**13.423.976.544**	**12.633.159.110**	**0,95**	**0,95**	**0,92**	**0,95**	**0,97**	**6,99**	**7,05**
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.998.660.605	14.371.510.719	13.565.503.471	12.512.053.000		15.351.032.277	13.241.047.977	12.871.996.544	12.172.489.110	-	0,96	0,92	0,95	0,97	-0,06	-0,05
2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	555.240.000	538.200.000	554.880.000	540.000.000	534.989.000	525.330.000	446.600.000	546.380.000	520.480.000	444.920.000	0,95	0,83	0,98	0,96	0,83	-0,01	-0,03
2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.080.000	8.863.690	7.829.016	23.709.600	5.473.800	4.080.000	4.762.500	6.840.000	10.500.000	5.250.000	1,00	0,54	0,87	0,44	0,96	0,58	0,16
2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	4.080.000	8.757.820	7.829.016	23.709.600	5.473.800	4.080.000	4.627.500	6.840.000	10.500.000	5.250.000	1,00	0,53	0,87	0,44	0,96	0,57	0,16

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Semesteran SKPD																	
2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.080.000	8.845.470	7.829.016	23.709.600	5.473.800	4.080.000	4.572.000	6.840.000	10.500.000	5.250.000	1,00	0,52	0,87	0,44	0,96	0,58	0,16
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**-**	**556.282.400**	**680.006.398**	**628.134.570**	**328.287.630**	**-**	**541.443.380**	**664.591.500**	**587.087.000**	**324.247.500**	**-**	**0,97**	**0,98**	**0,93**	**0,99**	**-0,08**	**-0,08**
2.15.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			680.006.398	323.400.000	75.802.500			664.591.500	289.800.000	75.397.500	-	-	0,98	0,90	0,99	-0,32	-0,33
2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		462.458.400		226.670.170	252.485.130		451.523.380		223.843.000	248.850.000	-	0,98	-	0,99	0,99	-0,22	-0,22
2.15.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem				1.800.000					1.800.000		-	-	-	1,00	-	-0,25	-0,25

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Informasi Kepegawaian																	
2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		93.824.000					89.920.000				-	0,96	-	-	-	-0,25	-0,25
2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				76.264.400					71.644.000		-	-	-	0,94	-	-0,25	-0,25
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2.065.132.000**	**4.098.115.279**	**3.090.147.124**	**3.015.999.312**	**2.138.940.705**	**1.833.320.622**	**2.369.693.644**	**1.413.058.955**	**2.593.504.850**	**1.942.458.293**	**0,89**	**0,58**	**0,46**	**0,86**	**0,91**	**0,11**	**0,12**
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		77.541.080	118.968.256	117.022.272	101.853.790		60.272.600	117.916.000	95.106.390	96.514.300	-	0,78	0,99	0,81	0,95	0,10	0,19
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan	600.258.000	376.619.430	48.482.148	21.242.326	525.216.614	594.713.900	372.267.300	40.822.800	-	521.111.945	0,99	0,99	0,84	-	0,99	5,48	-0,57

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Perlengkapan Kantor																	
2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	109.059.000	184.392.820	133.098.130	69.500.688	82.993.514	108.581.870	131.010.585	112.868.155	67.970.025	74.297.980	1,00	0,71	0,85	0,98	0,90	0,03	-0,06
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188.993.000	182.736.880	165.211.618	153.553.204	137.776.577	187.758.850	123.679.268	152.006.600	119.946.400	123.546.075	0,99	0,68	0,92	0,78	0,90	-0,08	-0,07
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	273.587.000	293.615.819	357.313.685	243.072.095	176.704.607	272.900.000	178.882.500	204.775.000	134.937.750	89.499.100	1,00	0,61	0,57	0,56	0,51	-0,08	-0,22
2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	487.985.000	306.450.000	195.000.000	137.700.000	85.582.320	295.930.000	204.644.000	110.920.400	55.505.000	60.863.525	0,61	0,67	0,57	0,40	0,71	-0,35	-0,29
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405.250.000	1.976.037.000	960.600.100	884.022.100	625.326.100	373.436.002	1.298.937.391	673.750.000	760.257.985	613.745.438	0,92	0,66	0,70	0,86	0,98	0,75	0,48
2.15.01.2.06.0009 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.229.141							-	-	-	-	-	-0,25	0,00

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		700.722.250	1.111.473.187	1.382.657.486	403.487.183				-	362.879.930	-	-	-	-	0,90	0,03	0,00
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**318.581.110**	**11.358.960.014**	**4.080.032.875**	**1.083.282.347**	**-**	**310.698.520**	**11.318.414.585**	**3.871.237.723**	**1.030.927.011**	-	**0,98**	**1,00**	**0,95**	**0,95**	**8,32**	**8,51**
2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			8.911.269.606	3.179.571.524	614.590.800			8.895.300.000	3.008.852.523	569.313.592	-	-	1,00	0,95	0,93	-0,36	-0,37
2.15.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			76.715.970		22.533.000			76.041.000		22.533.000	-	-	0,99	-	1,00	-0,25	-0,25
2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			1.551.122.575	772.386.299	251.711.515			1.545.986.700	742.363.000	251.189.000	-	-	1,00	0,96	1,00	-0,29	-0,30
2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			819.851.863		100.833.000			801.086.885		99.597.481	-	-	0,98	-	0,99	-0,25	-0,25

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		318.581.110		128.075.052	93.614.032		310.698.520		120.022.200	88.293.938	-	0,98	-	0,94	0,94	-0,32	-0,32
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**5.169.924.000**	**5.259.775.050**	**4.442.851.520**	**4.030.133.060**	**5.856.514.044**	**4.671.063.560**	**4.843.800.105**	**4.249.742.580**	**3.857.812.385**	**5.441.901.748**	**0,90**	**0,92**	**0,96**	**0,96**	**0,93**	**0,06**	**0,06**
2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.510.000	30.400.000	39.000.000	39.000.000	48.000.000	6.000.000	28.000.000	34.750.000	30.000.000	22.441.000	0,92	0,92	0,89	0,77	0,47	1,05	0,88
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	760.000.000	1.006.909.050	1.316.044.160	1.345.593.860	1.415.683.200	756.329.900	805.364.235	1.230.644.006	1.217.430.219	1.361.656.042	1,00	0,80	0,94	0,90	0,96	0,18	0,18
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.403.414.000	4.222.466.000	3.087.807.360	2.645.539.200	4.392.830.844	3.908.733.660	4.010.435.870	2.984.348.574	2.610.382.166	4.057.804.706	0,89	0,95	0,97	0,99	0,92	0,05	0,05
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	**1.792.420.000**	**6.610.876.800**	**5.390.816.121**	**6.652.248.411**	**4.637.870.289**	**1.556.582.418**	**4.913.169.582**	**3.908.723.859**	**5.493.120.789**	**3.593.780.085**	**0,87**	**0,74**	**0,73**	**0,83**	**0,77**	**0,61**	**0,50**

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.650.000		39.949.998	40.313.180	39.950.000	103.000.000		18.282.937	38.793.244	39.068.165	0,97	#DIV/0!	0,46	0,96	0,98	-0,25	0,03
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.439.470.000	4.297.348.300	3.442.434.717	3.790.056.942	3.238.678.590	1.232.298.718	2.735.822.435	2.393.515.902	2.919.210.683	2.307.856.322	0,86	-	0,70	0,77	0,71	0,44	0,28
2.15.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya			139.519.996	126.836.360	139.520.000			139.216.200	43.028.040	93.095.700	-	-	1,00	0,34	0,67	0,00	0,12

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	286.750.000	845.260.782	1.827.548.919	660.369.421	80.672.000	282.711.500	625.001.477	1.729.947.874	644.497.657	0,81	0,99	0,74	0,95	0,98	1,08	1,21
2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.524.898.800	412.780.984	395.604.000	66.232.680		1.507.709.075	411.445.700	393.280.648	45.010.500	-	0,99	1,00	0,99	0,68	-0,40	-0,41
2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.300.000	501.879.700	510.869.644	471.889.010	493.119.598	140.611.700	386.926.572	321.261.643	368.860.300	464.251.741	0,96	0,77	0,63	0,78	0,94	0,60	0,50
2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	**20.401.025.175**	**19.950.000.000**	**25.606.225.323**	**42.625.542.176**	**40.773.209.540**	**20.045.538.244**	**18.357.614.791**	**23.591.760.382**	**36.603.480.570**	**36.347.134.768**	**0,98**	**0,92**	**0,92**	**0,86**	**0,89**	**0,22**	**0,19**

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.401.025.175	19.950.000.000	25.606.225.323	42.625.542.176	40.773.209.540	20.045.538.244	18.357.614.791	23.591.760.382	36.603.480.570	36.347.134.768	0,98	0,92	0,92	0,86	0,89	0,22	0,19
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**161.431.373.000**	**190.363.827.616**	**234.917.505.175**	**247.143.091.003**	**256.660.589.934**	**158.442.141.427**	**180.798.593.337**	**221.361.175.331**	**240.845.634.943**	**247.764.006.529**	**0,98**	**0,95**	**0,94**	**0,97**	**0,97**	**0,13**	**0,12**
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**442.950.000**	**1.298.887.500**	**1.090.994.340**	**1.754.926.270**	**1.693.576.270**	**412.627.800**	**1.271.381.100**	**1.066.302.060**	**1.731.487.900**	**1.680.076.300**	**0,93**	**0,98**	**0,98**	**0,99**	**0,99**	**0,59**	**0,63**
2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	442.950.000	1.298.887.500	1.090.994.340	1.754.926.270	1.693.576.270	412.627.800	1.271.381.100	1.066.302.060	1.731.487.900	1.680.076.300	0,93	0,98	0,98	0,99	0,99	0,59	0,63
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**5.732.529.000**	**7.240.903.390**	**8.187.784.715**	**13.903.609.198**	**13.783.133.000**	**5.629.253.583**	**6.719.572.016**	**7.851.804.650**	**13.320.894.577**	**13.060.043.821**	**0,98**	**0,93**	**0,96**	**0,96**	**0,95**	**0,27**	**0,26**
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana	3.430.676.000	3.438.580.020	3.272.003.073	6.332.001.497	8.529.875.490	3.346.445.274	3.205.863.006	3.206.650.000	6.193.454.248	8.351.979.100	0,98	0,93	0,98	0,98	0,98	0,31	0,31

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.116.976.000	1.425.338.970	1.825.331.842	4.229.328.729	2.019.836.373	1.108.791.800	1.203.729.600	1.724.457.420	3.978.602.800	1.795.847.300	0,99	0,84	0,94	0,94	0,89	0,34	0,32
2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.184.877.000	1.719.825.000	2.202.000.000	2.507.861.890	2.597.460.978	1.174.016.509	1.681.127.308	2.071.408.576	2.383.985.029	2.335.378.103	0,99	0,98	0,94	0,95	0,90	0,23	0,20
2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		657.159.400	888.449.800	834.417.082	635.960.159		628.852.102	849.288.654	764.852.500	576.839.318	-	0,96	0,96	0,92	0,91	0,01	0,00
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**732.780.000**	**360.906.400**	**1.423.052.920**	**2.061.158.644**	**1.644.242.148**	**729.193.000**	**359.600.000**	**1.398.696.398**	**2.044.239.479**	**1.450.098.271**	**1,00**	**1,00**	**0,98**	**0,99**	**0,88**	**0,67**	**0,64**
2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal		-	466.273.690	632.262.855	649.145.383		-	443.775.148	629.448.479	544.038.358	-	-	0,95	1,00	0,84	0,10	0,07

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Penumpang Tipe C																	
2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	732.780.000	360.906.400	956.779.230	1.428.895.789	995.096.765	729.193.000	359.600.000	954.921.250	1.414.791.000	906.059.913	1,00	1,00	1,00	0,99	0,91	0,33	0,32
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**1.152.235.000**	**1.471.426.000**	**2.509.145.420**	**2.705.329.230**	**2.258.850.520**	**1.143.608.077**	**1.314.288.316**	**2.274.474.911**	**2.643.564.135**	**2.177.638.812**	**0,99**	**0,89**	**0,91**	**0,98**	**0,96**	**0,22**	**0,22**
2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	755.704.000	1.120.600.000	502.767.420	772.123.630	534.241.135	750.486.077	992.595.316	492.505.335	763.572.899	530.559.652	0,99	0,89	0,98	0,99	0,99	0,04	0,02

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	396.531.000	350.826.000	2.006.378.000	1.933.205.600	1.724.609.385	393.122.000	321.693.000	1.781.969.576	1.879.991.236	1.647.079.160	0,99	0,92	0,89	0,97	0,96	1,11	1,07
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**1.053.400.000**	**3.126.112.790**	**2.803.616.834**	**2.967.468.220**	**2.434.750.085**	**1.030.405.502**	**1.724.922.800**	**2.418.000.390**	**2.843.768.726**	**2.347.482.684**	**0,98**	**0,55**	**0,86**	**0,96**	**0,96**	**0,44**	**0,27**
2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		853.617.610		1.426.318.593	1.146.389.536				1.385.130.750	1.113.530.500	-	-	-	0,97	0,97	-0,30	-0,05

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	577.540.000	1.442.700.180	1.516.597.720	164.423.523	88.525.494	575.590.000	927.500.000	1.227.618.000	129.879.230	79.334.500	1,00	0,64	0,81	0,79	0,90	0,05	-0,09
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	475.860.000	829.795.000	1.287.019.114	1.376.726.104	1.199.835.055	454.815.502	797.422.800	1.190.382.390	1.328.758.746	1.154.617.684	0,96	0,96	0,92	0,97	0,96	0,31	0,31
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**4.236.090.000**	**5.124.232.886**	**10.436.117.866**	**5.408.791.198**	**4.758.269.201**	**3.992.391.285**	**-**	**6.576.260.643**	**5.022.030.727**	**4.550.995.676**	**0,94**	**-**	**0,63**	**0,93**	**0,96**	**0,16**	**-0,33**
Pengadaan. Pemasangan. Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.260.480.000		5.884.138.491			1.215.676.191		2.290.603.254			0,96	-	0,39	-	-	-0,50	#DIV/0!

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.640.550.000	3.159.500.000	3.533.452.255	4.423.944.684	3.665.815.672	2.636.065.094		3.365.578.578	4.088.162.859	3.533.061.176	1,00	-	0,95	0,92	0,96	0,10	-0,23
2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	335.060.000	1.964.732.886	822.247.120	712.800.000	1.002.010.345	140.650.000		759.588.000	673.846.800	927.853.000	0,42	-	0,92	0,95	0,93	1,14	-0,18
2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			196.280.000	272.046.514	90.443.184			160.490.811	260.021.068	90.081.500	-	-	0,82	0,96	1,00	-0,07	-0,01
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	**-**	**-**	**231.568.100**	**79.500.000**	**57.750.000**	**-**	**-**	**135.990.000**	**79.156.500**	**28.500.000**	**-**	**-**	**0,59**	**1,00**	**0,49**	**-0,23**	**-0,26**

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Kabupaten/Kota																	
2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			95.818.100	66.000.000	13.500.000			88.440.000	65.656.500	3.375.000	-	-	0,92	0,99	0,25	-0,28	-0,30
2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			135.750.000	13.500.000	44.250.000			47.550.000	13.500.000	25.125.000	-	-	0,35	1,00	0,57	0,34	0,04
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**-**	**-**	**59.703.780**	**516.106.340**	**674.473.680**	**-**	**-**	**49.050.000**	**509.264.898**	**670.581.992**	**-**	**-**	**0,82**	**0,99**	**0,99**	**1,99**	**2,42**
2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			59.703.780	516.106.340	674.473.680			49.050.000	509.264.898	670.581.992	-	-	0,82	0,99	0,99	1,99	2,42

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**148.081.389.000**	**171.119.683.923**	**207.310.512.024**	**216.812.312.213**	**228.779.165.450**	**145.504.662.180**	**168.830.352.375**	**198.780.587.179**	**211.801.468.293**	**221.365.179.433**	**0,98**	**0,99**	**0,96**	**0,98**	**0,97**	**0,12**	**0,11**
2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4.560.000		103.094.740	96.323.391	111.730.810	-		100.189.000	93.615.000	99.931.400	-	-	0,97	0,97	0,89	-0,23	0,00
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	148.076.829.000	171.119.683.923	207.207.417.284	216.715.988.822	228.667.434.640	145.504.662.180	168.830.352.375	198.680.398.179	211.707.853.293	221.265.248.033	0,98	0,99	0,96	0,98	0,97	0,12	0,11

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**46.116.227**	**172.828.580**	**149.980.210**	**202.649.830**	**-**	**33.598.775**	**149.198.100**	**117.244.750**	**181.656.340**	**-**	**0,73**	**0,86**	**0,78**	**0,90**	**0,74**	**0,94**
2.15.02.2.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		46.116.227	172.828.580	149.980.210	202.649.830		33.598.775	149.198.100	117.244.750	181.656.340	-	0,73	0,86	0,78	0,90	0,74	0,94

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**391.147.700**	**199.971.580**	**185.728.660**	**54.700.940**	**-**	**386.762.000**	**198.269.000**	**180.787.911**	**46.490.000**	**-**	**0,99**	**0,99**	**0,97**	**0,85**	**-0,32**	**-0,33**
2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		195.825.000	99.978.940		49.675.940		193.393.000	99.430.000		43.115.000	-	0,99	0,99	-	0,87	-	-0,32
2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		195.322.700	99.992.640	185.728.660	5.025.000		193.369.000	98.839.000	180.787.911	3.375.000	-	0,99	0,99	0,97	0,67	-0,15	-0,16

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**184.410.800**	**310.348.240**	**379.014.780**	**245.082.810**	**-**	**158.115.955**	**286.338.000**	**341.095.716**	**137.536.200**	-	**0,86**	**0,92**	**0,90**	**0,56**	**0,14**	**0,10**
2.15.02.2.13.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		139.230.000	112.290.840	62.805.370	43.246.500		134.759.455	105.737.500	58.564.120	36.265.000	-	0,97	0,94	0,93	0,84	-0,24	-0,26

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.02.2.13.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		45.180.800	198.057.400	316.209.410	201.836.310		23.356.500	180.600.500	282.531.596	101.271.200	-	0,52	0,91	0,89	0,50	0,90	1,66
2.15.02.2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**181.860.776**	**219.166.040**	**73.946.000**	**-**	**-**	**176.204.000**	**210.631.331**	**67.727.000**	**-**	**-**	**0,97**	**0,96**	**0,92**	**-0,11**	**-0,12**

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*
2.15.02.2.15.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			100.860.776	113.144.840	14.796.000			97.454.000	108.131.500	8.877.000	-	-	0,97	0,96	0,60	-0,19	-0,20
2.15.02.2.15.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota			81.000.000	106.021.200	59.150.000			78.750.000	102.499.831	58.850.000	-	-	0,97	0,97	0,99	-0,03	-0,03

c. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat Kota Semarang, Dinas Perhubungan telah menjalin berbagai kerjasama dengan perangkat daerah lain maupun dengan pihak swasta. Berikut beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang:

1) Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengoperasian layanan Trans Jateng dan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang, dimana kerjasama ini saling mendukung dalam pelayanan angkutan umum massal BRT. Penyelenggaraan operasional yang dimaksud adalah pengaturan jadwal perjalanan, penyampaian informasi layanan serta keamanan dan keselamatan. Selain hal itu, guna mendukung peningkatan kualitas layanan dan kuantitas masyarakat yang terlayani, BRT Trans Semarang juga berkolaborasi dengan pihak swasta sebagai operator dan pihak perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA untuk memberikan layanan pembayaran non-tunai;
2) Dalam pengembangan terminal type C di Cangkiran Dinas Perhubungan melibatkan berbagai instansi di Pemerintah Kota Semarang (Bappeda, DPRD, Distaru dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)).

d. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD Kota Semarang dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan adalah dengan adanya beberapa kerjasama seperti:

1) Dalam hal pengadaan kebutuhan perlatan kantor dan barang cetakan, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera;
2) Dalam hal pengadaan air minum, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

e. Inovasi Perangkat Daerah

Beberapa Inovasi yang sudah dikembangkan atau diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang pada periode 2020-2024 sebagai berikut:

1) Penyesuaian tarif umum BRT Rp. 3.500,00 (non tunai), tarif umum BRT Rp. 4.000,00 (tunai) yang bertujuan mendorong masyarakat membayar BRT secara non tunai;
2) Penyesuaian tarif BRT khusus lansia, veteran dan disabilitas Rp. 1.000,00 yang bertujuan mendorong kemudahan akses angkutan umum untuk lansia, veteran, dan disabilitas;
3) Menetapkan tarif angkutan Kota Semarang dan menyetujui penetapan tarif angkutan taksi batas atas batas bawah di Kota Semarang yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
4) Penyesuaian tarif pelajar / mahasiswa Rp. 0,00 sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan, sekaligus meringankan beban

biaya transportasi bagi pelajar dan mahasiswa yang berdomisili di Kota Semarang.

f. Penghargaan Perangkat Daerah

Pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 Dinas Perhubungan Kota Semarang mendapatkan berbagai penghargaan atas beberapa prestasi sebagai berikut:

1) Juara I lomba Terminal Sehat tipe C Tingkat Nasional (Tahun 2020);
2) Penghargaan Indonesia Smart Nation Award (ISNA) ke-4 tahun 2020 kategori Smart Living untuk aplikasi Trans Semarang (Tahun 2020);
3) Pemenang III Lomba Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2022);
4) Pemenang II Kategori Inovasi Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2022);
5) Penghargaan dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berupa Sertifikat untuk Pemerintah Daerah dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Terbaik (Tahun 2023);
6) Pemenang III Lomba Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2023);
7) Pemenang II Kategori Inovasi Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2023);
8) Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk kategori Pemerintah Kota yang dalam penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan indikator paling baik (Tahun 2024);
9) Anugrah Jawa Pos Radar Semarang Tahun 2024 Kategori Transportasi Ramah Disabilitas (Tahun 2024).

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut:

1) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Kenaikan penjualan kendaraan bermotor berdampak pada kepemilikan kendaraan yang memicu tingginya lalu lintas, hal ini berdampak pada kepadatan lalu lintas di jaringan jalan yang berada di wilayah Kota Semarang, mengingat jumlah pertumbuhan jalan di Kota Semarang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Hal ini menyebabkan penerapan manajemen lalu lintas yang menjadi kurang optimal karena tingginya pertumbuhan kendaran yang tidak linier dengan pertumbuhan ruas jalan. Opsi penambahan atau pelebaran jalan juga sulit karena masalah pembiayaan yang tinggi,

selain itu opsi penambahan atau pelebaran jalan juga cenderung akan menjadikan pertumbuhan kendaraan pribadi semakin tinggi (*invitation concept*). Di sisi lain, penyediaan angkutan umum bersubsidi di perkotaan Kota Semarang juga akan terkendala efek kemacetan yang terjadi karena pola angkutan Kota Semarang yang masih bercampur (*mix traffic*), yang berakibat pada penurunan kinerja angkutan umum;

2) Parkir pada Badan Jalan (*Off Street Parking*). Fenomena meningkatnya penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir juga terjadi khususnya di ruas-ruas jalan di Kawasan Perkotaan Semarang. Hal ini disebabkan karena beberapa hal berikut ini.
   - Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang secara langsung berdampak pada tingginya kebutuhan (*demand*) lokasi parkir;
   - Tumbuhnya titik-titik pusat kegiatan baru (*trip attraction*) yang berakibat pada pertumbuhan permintaan perjalananan (*traffic demand*) dan permintaan parkir (*parking demand*);
   - Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penyediaan off street parking sesuai dengan aturan dampak lalu lintas, khususnya pada lokasi-lokasi kegiatan yang berpotensi menarik perjalanan.

   Dari aspek permasalahan perparkiran ini, Dinas Perhubungan Kota Semarang telah berupaya membangun dan menyediakan lokasi-lokasi parkir baru di luar badan jalan (*off street parking*), untuk menambah lokasi-lokasi TKP (Tempat Khusus Parkir) yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang;
3) Isu global terkait dengan perubahan iklim (*climate changes*) serta tingginya efek gas rumah kaca khususnya di area perkotaan yang diakibatkan oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil mendorong adanya kebijakan untuk mereduksi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mewujudkan Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah Kota Semarang. Guna mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang mendukung terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum serta Terkendalinya Emisi di Sektor Transportasi;
4) Penyelesaian permasalahan transportasi di Kota Semarang pada saat ini cenderung masih bersifat parsial dan belum tepat sasaran. Hal tersebut dipertegas dengan belum adanya konsep perencanaan dan implementasi penyelesaian permasalahan transportasi yang komprehensif serta memiliki *legal standing* yang tegas dan mengikat. Perlu adanya suatu Rencana Induk Transportasi yang menjembatani berbagai permasalahan transportasi baik secara makro maupun mikro yang dinaungi oleh satu Peraturan Daerah di Kota Semarang yang tegas dan mengikat;
5) Tingginya mobilitas penduduk dalam aktivitas perdagangan dan jasa di Kota Semarang perlu diimbangi penambahan dengan penambahan pelayanan transportasi umum antar moda;
6) Sarana dan prasarana lalu lintas perlu peningkatan dalam kuantitas dan kualitasnya yang disesuikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi untuk mendokung implementasi *Smart City;*
7) Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan. Hal ini juga menjadi tantangan dalam peningkatan rasa aman dalam berkendara khususnya pada kelompok rentan seperti perempuan, anak,

disabilitas, dan lansia, yang menjadi bagian dalam mendukung implementasi pengarus utamaan gender (PUG);
8) Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor;
9) Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perhubungan perlu terus ditingkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Telah adanya dukungan regulasi baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri untuk mengutamakan angkutan umum;
2) Adanya dukungan instansi terkait dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Bidang Perhubungan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran peraturan bidang perhubungan;
3) Adanya potensi tempat khusus parkir pada lahan / persil milik warga dengan memberikan rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan perparkiran, dengan maksud untuk mengurangi beban parkir on street;
4) Memiliki banyak tempat wisata budaya fisik yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Semarang yang menjadikan Kota Semarang sebagai tempat tujuan wisata;
5) Adanya perkembangan teknologi yang berdampak pada peningkatan kualitas sarana dan prasaran lalu lintas;
6) Adanya kemauan yang kuat dari SDM Perhubungan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perhubungan Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu: “Masih tingginya tingkat kepadatan lalu lintas” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rumusan Permasalahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	*2*	*3*
1	Belum optimalnya pengelolaan lalu lintas	Belum terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan
		Belum Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum (PJU)
		Rendahnya tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan Uji Berkala
		Belum optimalnya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum	Kurangnya pengawasan angkutan barang, hewan dan khusus
		Kurangnya pengawasan angkutan orang dalam trayek
		Kurangnya perizinan angkutan orang dalam trayek
		Kurangnya pelayanan angkutan penumpang umum
		Kurang Optimalnya Pengelolaan Terminal Penumpang type C
		Kurangnya perizinan angkutan orang tidak dalam trayek
3	Belum optimalnya pengendalian & penertiban lalu lintas	Belum optimalnya pengendalian & penertiban lalu lintas
		Rendahnya tingkat pengendalian lalu lintas
		Rendahnya pembinaan dan pengawasan lalu lintas
4	Belum optimalnya pengelolaan parkir	Belum optimalnya pendataan, penataan, perizinan dan pemungutan retribusi parkir
5	Belum optimalnya kualitas Kelembagaan Dinas Perhubungan	Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan
		Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Perhubungan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Perhubungan

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Salah satu Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi dengan sasaran Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan isu yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut:

1) Waktu tempuh koridor utama jalan nasional di Indonesia (2,14 jam/100km) relatih lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti di Malaysia 1,09 jam/100km, Tahiland 1,30 jam/100km dan Vietnam 1,96 jam/100km);
2) Tingginya kerugian ekonomi karena kemacetan lalu lintas (Rp.65 triliun per tahun) yang diakibatkan terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan (pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih dibawah 20%);

3) Tingginya pelanggaran kendaraan muatan berlebih akibat kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sebesar 40%-50% kendaraan di lintas utama Pulau Jawa dan 30%-40% kendaraan di Sumatra tergolong ODOL;

Arah kebijakan untuk isu-isu tersebut yaitu dengan Pengembangan Konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda.

Persandingan Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Persandingan Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran

Dinas Perhubungan Kota Semarang

RPJMN 2025-2029			**Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang 2025-2029**	
Prioritas Nasional	**Isu Nasional**	**Arah Kebijakan**	**Tujuan**	**Sasaran**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi dengan sasaran Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang berkelanjutan	Waktu tempuh koridor utama jalan nasional di Indonesia relatih lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya	Pengembangan Konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda	Meningkatan Mobilitas Berkelanjutan di Kota Semarang	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum
	Tingginya kerugian ekonomi karena kemacetan lalu lintas yang diakibatkan terbatasnya sistem angkutan umum massal			Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan
	Tingginya pelanggaran kendaraan muatan berlebih akibat kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.			

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"**Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari Dan Inklusif**"

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas ekspor-impor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga

diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan

dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan, maka misi yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1) Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian;
2) Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi;
3) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak;
4) Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif ke level global;
5) Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
6) Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat;

7) Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

Dinas Perhubungan Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai misi ke 5 yaitu Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

c. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia maka Kementerian Perhubungan RI menetapkan tujuan sebagai berikut:

1) Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025-2045;
2) Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3) Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;
4) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Sasaran nasional dan sasaran strategis untuk mendukung tujuan tersebut adalah:

1) Penurunan biaya logistik, penurunan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan stok infrastruktur;
2) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
3) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;
4) Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
5) Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional;
6) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
7) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik.

Persandingan tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan RI dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11 Persandingan Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan RI dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang

Renstra Kementerian Perhubungan RI		**Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang**	
Tujuan	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**
1	***2***	***3***	***4***
Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025-2045	Penurunan biaya logistik, penurunan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan stok infrastruktur	Meningkatan mobilitas berkelanjutan di Kota Semarang	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum
Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional		
	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional		
	Meningkatnya keselamatan transportasi nasional		
Terwujudnya kebijakan dan SDM	Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional		Meningkatnya kualitas kinerja

Renstra Kementerian Perhubungan RI		Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang	
Tujuan	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**
1	***2***	***3***	***4***
transportasi yang berkualitas	Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten		pelayanan Dinas Perhubungan
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik		

d. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1) Meningkatnya kualitas layanan transportasi dengan sasaran:
   - Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah;
   - Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah.
2) Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis dengan sasaran:
   - Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
   - Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Persandingan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12 Persandingan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Meningkatkan Mobilitas Berkelanjutan di Kota Semarang	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum
	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah		

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan

prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Perturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 untuk kawasan transportasi dijabarkan sebagai berikut:

1) Kawasan Transportasi di daratan, dengan luas kurang lebih 941 hektar yang terdapat di:
   a) Kecamatan Mijen;
   b) Kecamatan Gunungpati;
   c) Kecamatan Genuk;
   d) Kecamatan Tugu;
   e) Kecamatan Semarang Utara;
   f) Kecamatan Semarang Timur;
   g) Kecamatan Semarang Barat; dan
   h) Kecamatan Pedurungan.
2) Kawasan transportasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan transpoertasi dengan luas kurang lebih 281 (dua ratus delapan puluh satu) hektar berada di pantai utara Kecamatan Semarang Utara.

   Pengembangan kegiatan transportasi meliputi:
   a) Teminal angkutan umum;
   b) Stasiun kereta api antar kota dan kereta api perkotaan;
   c) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani;
   d) Pelabuhan Tanjung Emas; dan
   e) Pengembangan dermaga angkutan sungai dan penyeberangan.

   Adapun kebijakan tata ruang wilayah Kota Semarang yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut:
   1) Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
   2) Mengembangkan sistem transportasi massal;
   3) Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
   4) Mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan
   5) Meningkatkan integrasi sistem antar moda.

Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah terhadap Renstra Dinas Perhubungan lebih jelas terihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 13 Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon		V	V	V	V
2	Meningkatkan integrasi sistem antar moda						
3	Mengembangkan sistem transportasi massal						
4	Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal type C	V	V	V	V	V

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah terkait pemenuhan sarana prasarana minimal permukiman.

Tabel 2. 14 Tema Isu KLHS terhadap Dinas Perhubungan Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
1	*2*
Dukungan terhadap transportasi publik berkelanjutan	1. Masih rendahnya pengguna moda transportasi umum di perkotaan
	2. Perlunya pengembangan angkutan berbasis rel di kota besar

Tabel 2. 15 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	12,01	16,01	20,01	24,00	28	32	• Substitusi kendaraan berbahan bakar BBM menjadi kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan (listrik dan BBG) • Peningkatan jumlah trayek dan moda transportasi umum • Pengembangan dedicated line untuk transportasi publik massal
2	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	-	-	-	-	ada	ada	

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Dinas Perhubungan Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Isu Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Semarang

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Adanya Bus Rapid Transit (BRT) yang rutenya menjangkau seluruh kota	Masih tingginya tingkat kepadatan lalu lintas	Dukungan terhadap transportasi publik berkelanjutan	Waktu tempuh koridor utama jalan nasional di Indonesia relatih lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya	Tingginya kerugian ekonomi karena kemacetan lalu lintas yang diakibatkan terbatasnya sistem angkutan umum massal	Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi dengan transportasi umum yang memadai serta kurangnya sarana prasarana pendukung

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang perhubungan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Mobilitas Berkelanjutan di Kota Semarang

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum yang difokuskan pada:
   b. Persentase ruas jalan yang macet;
   c. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan yang difokuskan pada:
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan;
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan.

Untuk selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
NSPK: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda											
Sasaran RPJMD: Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan											
	Meningkatnya Mobilitas Berkelanjutan di Kota Semarang		Rasio Konektivitas	rasio	0,89	0,9	0,9	0,91	0,92	0,93	
		Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum	Persentase ruas jalan yang macet	Persen	36,35	36,15	36,05	35,96	35,86	35,76	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum	Persen	61,5	62	62,5	63	63,5	64	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	Angka	75,26	75,76	76,26	76,76	77,26	77,76	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	Angka	91,18	91,88	92,58	93,28	93,98	94,68	

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perhubungan Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Tahapan Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang

TAHAP I	**TAHAP II**	**TAHAP III**	**TAHAP IV**	**TAHAP V**
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
Merancang strategi pengendalian lalu lintas berdasarkan data dan tujuan yang telah ditetapkan, seperti penentuan zona kerja atau lokasi penempatan rambu.	Penerapan teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas	Mengumpulkan dan menganalisis data pelanggaran lalu lintas, serta memantau daerah rawan kecelakaan secara terus-menerus	Memastikan bahwa tindakan pengendalian yang sudah diterapkan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku	Melakukan penilaian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan di masa mendatang.
Menentukan titik-titik parkir yang potensial berdasarkan pusat kegiatan seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan pusat kuliner	Membuat rumusan aktivitas pengelolaan parkir untuk masa depan yang didasarkan pada kondisi dan fakta yang ada, misalnya pemetaan zona	Menerapkan tarif yang sesuai dan sistem yang meminimalkan kebocoran pendapatan, seperti sistem parkir non tunai.	Melakukan pemantauan secara rutin terhadap setoran retribusi parkir untuk memastikan jumlahnya sesuai dengan yang seharusnya dan menemukan potensi kebocoran	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan parkir untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang lebih baik untuk masa depan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	potensi retribusi dan kawasan rawan			
Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah penumpang, rute, kinerja angkutan, dan kondisi eksisting	Menyediakan armada dan melakukan perawatan berkala terhadap kendaraan agar selalu dalam kondisi prima dan nyaman	Menerapkan teknologi dalam perencanaan rute dan penjadwalan untuk meningkatkan efisiensi	Melibatkan aspirasi masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengembangan angkutan umum untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi	Memberikan penghargaan kepada pengemudi yang menunjukkan kinerja pelayanan terbaik
Melakukan survei dan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas, termasuk penentuan lokasi, jenis, dan jumlah	Melakukan pengembangan terhadap APILL, rambu, marka, dan fasilitas lalu lintas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya	Mengatur dan mengelola penggunaan sarana dan prasarana yang ada agar berjalan sesuai fungsinya dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar	Menganalisis dan mengolah data kerusakan atau kondisi prasarana lalu lintas untuk dasar pengambilan keputusan	Mengevaluasi kinerja sarana dan prasarana lalu lintas secara rutin untuk memastikan efektivitasnya dan merumuskan kebijakan perbaikan di masa mendatang

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	NSPK: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda			
	Sasaran RPJMD: Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan	Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi publik	Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Meningkatkan partisipasi pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan Uji Berkala	
			Optimalisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	
			Peningkatan digitalisasi pengeloaaan parkir tepi jalan umum	
			Peningkatan penataan lahan parkir (zonasi parkir)	
		Integrasi transportasi antarwilayah dan pengembangan sistem angkutan massal ramah lingkungan	Peningkatan pengawasan angkutan barang, hewan dan khusus	
			Peningkatan pengawasan angkutan umum	
			Mensosialisasikan perizinan angkutan orang dalam trayek	
			Peningkatan Load Factor penumpang BRT	
			Peningkatan Arus penumpang orang di Terminal Tipe C	
			Mensosialisasikan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek	
			Peningkatan pengendalian lalu lintas	
			Peningkatan penertiban lalu lintas	
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan lalu lintas	
			Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Perhubungan	
			Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Perhubungan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perhubungan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
NSPK: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	**Meningkatnya Mobilitas Berkelanjutan di Kota Semarang**				**Rasio Konektivitas**		
Sasaran RPJMD: Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan		**Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum**			**Indikator 1: Persentase ruas jalan yang macet**		
			Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan		**Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota**	**2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kepala Bidang Lalu Lintas**
				Terlaksananya MRLL	Persentase Pelaksanaan MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Subkoordinator Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas	2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya perlengkapan jalan	Persentase penyediaan perlengkapan jalan yang terlaksana	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan
				Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Tersedianya Penerangan Jalan (PJU)	Persentase penyediaan Penerangan Jalan (PJU)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PJU
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	Persentase penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kepala Subbagian Tata Usaha Pengujuan Kendaraan Bermotor
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kepala Subbagian Tata Usaha Pengujuan Kendaraan Bermotor
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kepala Subbagian Tata Usaha Pengujuan Kendaraan Bermotor
			Meningkatnya kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik fungsi kendaraan bermotor		**Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang**	**2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya penertiban lalu lintas angkutan umum dan barang	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Penertiban
				Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan lalu lintas	Persentase pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlakanaya penyelengaraan pengawasan andalalin	Persentase penyelengaraan pengawasan andalalin	2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak LaluLintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pengendalian
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
			Meningkatnya pengendalian dan pengawasan parkir on the street		**Persentase pengelolaan Parkir On the Street**	**2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kepala Bidang Parkir**
				Terpenuhinya pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Persentase pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kepala Seksi Penataan dan Perizinan
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya pemungutan retribusi parkir	Persentase pemenuhan pemungutan parkir	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kepala Seksi Pemungutan
				Terlaksananya pendataan parkir	Persentase pemenuhan pendataan parkir	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Subkoordinator Pendataan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		
			Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum		**Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk**	**2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kepala Bidang Angkutan**
				Terkelolanya Terminal Penumpang Type C	Persentase Arus penumpang orang di Terminal Tipe C	2.15.02.2.03 PengelolaanTerminal Penumpang Tipe C	Kepala UPTD Terminal
				Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Terminal
				Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Terminal
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Terminal

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terselenggaranya Pemantauan angkutan	Persentase penyelenggaraan Pemantauan angkutan	2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kepala Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek
				Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendaliandan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah penumpang BRT	**Load Factor Penumpang**	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD Trans Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Trans Semarang
				Terpenuhinya pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi	Persentase pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi	2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
				Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilaksanakan	2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Angkutan Orang dalam Trayek
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Tra	2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kotayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan			**(1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan**		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan		**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas**	**2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sekretaris Dinas**
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
					(2) Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan		**Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan**	**2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sekretaris Dinas**
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perhubungan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perhubungan	2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2.15.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan	2.15.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dibayarkan Perizinannya	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kepala UPTD Trans Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu “Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon dan Penyediaan layanan Bus Gratis bagi Siswa dan mahasiswa ber-KTP Kota Semarang”. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Sub Kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon	Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	Penyediaan layanan Bus Gratis bagi Siswa dan mahasiswa ber-KTP Kota Semarang			

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029, pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) yang ramah lingkungan menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah kota untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi karbon. Upaya ini diwujudkan melalui program strategis "Peningkatan kualitas dan Kuantitas BRT/New BRT yang Rendah Karbon. RPJMD Kota Semarang juga menyoroti perlunya peremajaan armada BRT. Saat ini, sebagian armada BRT masih menggunakan standar emisi EURO 2 yang sudah tertinggal. Oleh karena itu, ke depannya akan diupayakan peremajaan armada secara merata di seluruh koridor dengan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Semarang dalam menciptakan sistem transportasi publik yang tidak hanya efisien dan terintegrasi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan visi kota yang modern dan berwawasan lingkungan.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.2.

Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Semarang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15 -URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				357.072.597.366		395.416.451.867		412.105.482.131		415.171.019.845		422.401.988.455		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				75.197.888.393		83.720.631.882		87.430.126.555		88.111.508.016		89.718.745.771		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan (%)	100 %	100 %	75.197.888.393	100 %	83.720.631.882	100 %	87.430.126.555	100 %	88.111.508.016	100 %	89.718.745.771	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas (%)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.126.900		20.126.900		20.126.900		20.126.900		20.126.900		
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.532.300		2.532.300		2.532.300		2.532.300		2.532.300		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	2.532.300	4 Dokumen	2.532.300	4 Dokumen	2.532.300	4 Dokumen	2.532.300	4 Dokumen	2.532.300		
2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.532.300		2.532.300		2.532.300		2.532.300		2.532.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.532.300	1 Dokumen	2.532.300	1 Dokumen	2.532.300	1 Dokumen	2.532.300	1 Dokumen	2.532.300		
2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.631.800		2.631.800		2.631.800		2.631.800		2.631.800		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.631.800	1 Dokumen	2.631.800	1 Dokumen	2.631.800	1 Dokumen	2.631.800	1 Dokumen	2.631.800		
2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.532.300		2.532.300		2.532.300		2.532.300		2.532.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.532.300	1 Dokumen	2.532.300	1 Dokumen	2.532.300	1 Dokumen	2.532.300	1 Dokumen	2.532.300		
2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.751.800		2.751.800		2.751.800		2.751.800		2.751.800		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.751.800	1 Dokumen	2.751.800	1 Dokumen	2.751.800	1 Dokumen	2.751.800	1 Dokumen	2.751.800		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.362.600		5.362.600		5.362.600		5.362.600		5.362.600		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	5.362.600	4 Laporan	5.362.600	4 Laporan	5.362.600	4 Laporan	5.362.600	4 Laporan	5.362.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				46.783.800		46.783.800		46.783.800		46.783.800		46.783.800		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	46.783.800	1 Dokumen	46.783.800	1 Dokumen	46.783.800	1 Dokumen	46.783.800	1 Dokumen	46.783.800		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.734.963.711		24.879.260.737		26.080.414.785		27.341.265.129		28.664.792.970		
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.601.597.311		24.745.894.337		25.947.048.385		27.207.898.729		28.531.426.570		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	210 Orang/ bulan	210 Orang/ bulan	23.601.597.311	210 Orang/ bulan	24.745.894.337	210 Orang/ bulan	25.947.048.385	210 Orang/ bulan	27.207.898.729	210 Orang/ bulan	28.531.426.570		
2.15.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				115.295.000		115.295.000		115.295.000		115.295.000		115.295.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	115.295.000	12 Dokumen	115.295.000	12 Dokumen	115.295.000	12 Dokumen	115.295.000	12 Dokumen	115.295.000		
2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.623.800		8.623.800		8.623.800		8.623.800		8.623.800		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	8.623.800	1 Laporan	8.623.800	1 Laporan	8.623.800	1 Laporan	8.623.800	1 Laporan	8.623.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.423.800		7.423.800		7.423.800		7.423.800		7.423.800		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	7.423.800	4 Laporan	7.423.800	4 Laporan	7.423.800	4 Laporan	7.423.800	4 Laporan	7.423.800		
2.15.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.023.800		2.023.800		2.023.800		2.023.800		2.023.800		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.023.800	1 Dokumen	2.023.800	1 Dokumen	2.023.800	1 Dokumen	2.023.800	1 Dokumen	2.023.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Realisasi Anggaran	Anggaran (Dokumen)													
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.802.500		447.318.550		178.870.787		180.448.200		182.057.160		
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perhubungan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000		320.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	300 Paket	30 Paket	50.000.000	300 Paket	320.000.000	30 Paket	50.000.000	30 Paket	50.000.000	30 Paket	50.000.000		
2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Administrasi Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000		
2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.802.500		77.318.550		78.870.787		80.448.200		82.057.160		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 orang	200 orang	75.802.500	200 orang	77.318.550	200 orang	78.870.787	200 orang	80.448.200	200 orang	82.057.160		
2.15.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		25 orang	35.000.000	25 orang	35.000.000	25 orang	35.000.000	25 orang	35.000.000	25 orang	35.000.000		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.541.678.515		1.766.846.740		1.601.938.000		1.632.976.460		1.464.637.000		
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				88.770.000		90.545.000		92.356.000		94.203.000		96.087.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	88.770.000	1 Paket	90.545.000	1 Paket	92.356.000	1 Paket	94.203.000	1 Paket	96.087.000		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000		
2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				77.109.900		78.652.000		80.225.000		81.829.000		83.466.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	77.109.900	1 Paket	78.652.000	1 Paket	80.225.000	1 Paket	81.829.000	1 Paket	83.466.000		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				117.271.865		119.616.000		122.008.000		124.448.860		126.937.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	117.271.865	1 Paket	119.616.000	1 Paket	122.008.000	1 Paket	124.448.860	1 Paket	126.937.000		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				194.977.700		198.877.000		202.854.000		206.911.000		211.050.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	194.977.700	1 Paket	198.877.000	1 Paket	202.854.000	1 Paket	206.911.000	1 Paket	211.050.000		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				97.500.000		99.450.000		101.439.000		103.467.000		105.537.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	97.500.000	12 Laporan	99.450.000	12 Laporan	101.439.000	12 Laporan	103.467.000	12 Laporan	105.537.000		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				476.341.720		585.868.000		495.585.000		505.497.600		415.607.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	476.341.720	12 Laporan	585.868.000	12 Laporan	495.585.000	12 Laporan	505.497.600	12 Laporan	415.607.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				439.707.330		543.838.740		457.471.000		466.620.000		375.953.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	394.707.330	1 Dokumen	498.838.740	1 Dokumen	412.471.000	1 Dokumen	421.620.000	1 Dokumen	330.953.000		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				617.468.100		1.822.652.000		1.661.259.943		636.899.000		643.636.000		
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000		900.000.000		900.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4 Unit	1 Unit	250.000.000	3 Unit	900.000.000	3 Unit	900.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000		
2.15.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				41.558.400		42.389.000		43.237.000		44.102.000		44.984.000		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	6 Unit	6 Unit	41.558.400	6 Unit	42.389.000	6 Unit	43.237.000	6 Unit	44.102.000	6 Unit	44.984.000		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				45.258.900		184.000.000		47.087.000		48.029.000		48.989.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9 Unit	9 Unit	45.258.900	36 Unit	184.000.000	9 Unit	47.087.000	9 Unit	48.029.000	9 Unit	48.989.000		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000		
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				185.858.400		600.575.000		574.333.943		197.234.000		201.179.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	1 Unit	185.858.400	3 Unit	600.575.000	3 Unit	574.333.943	1 Unit	197.234.000	1 Unit	201.179.000		
2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.792.400		45.688.000		46.602.000		47.534.000		48.484.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12 Unit	12 Unit	44.792.400	12 Unit	45.688.000	12 Unit	46.602.000	12 Unit	47.534.000	12 Unit	48.484.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.015.690.800		5.422.004.000		5.530.444.700		5.641.053.450		5.753.874.660		
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				48.000.000		48.960.000		49.939.200		50.937.900		51.956.740		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	48.960.000	1 Laporan	49.939.200	1 Laporan	50.937.900	1 Laporan	51.956.740		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.321.690.800		1.348.124.000		1.375.087.100		1.402.588.850		1.430.640.620		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1.321.690.800	12 Laporan	1.348.124.000	12 Laporan	1.375.087.100	12 Laporan	1.402.588.850	12 Laporan	1.430.640.620		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.646.000.000		4.024.920.000		4.105.418.400		4.187.526.700		4.271.277.300		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	2.646.000.000	12 Laporan	4.024.920.000	12 Laporan	4.105.418.400	12 Laporan	4.187.526.700	12 Laporan	4.271.277.300		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.542.157.867		5.357.422.955		5.451.571.440		5.147.602.880		5.194.775.170		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.603.600		40.395.675		41.203.580		42.027.660		42.868.210		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	1 Unit	39.603.600	1 Unit	40.395.675	1 Unit	41.203.580	1 Unit	42.027.660	1 Unit	42.868.210		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.551.496.700		3.928.526.600		4.007.097.160		4.087.239.110		4.168.983.890		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	118 Unit	118 Unit	2.551.496.700	118 Unit	3.928.526.600	118 Unit	4.007.097.160	118 Unit	4.087.239.110	118 Unit	4.168.983.890		
2.15.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				157.420.850		160.569.270		163.780.650		167.056.260		170.397.390		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	13 Unit	13 Unit	157.420.850	13 Unit	160.569.270	13 Unit	163.780.650	13 Unit	167.056.260	13 Unit	170.397.390		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		600.000.000		600.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7 Unit	1 Unit	200.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.619.820		49.592.210		50.584.060		51.595.740		52.627.650		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	2 Unit	48.619.820	2 Unit	49.592.210	2 Unit	50.584.060	2 Unit	51.595.740	2 Unit	52.627.650		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				495.016.897		528.339.200		538.905.990		549.684.110		509.898.030		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8 Unit	8 Unit	495.016.897	8 Unit	528.339.200	8 Unit	538.905.990	8 Unit	549.684.110	8 Unit	509.898.030		
2.15.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				41.550.000.000		44.005.000.000		46.905.500.000		47.511.135.997		47.794.845.911		
Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				41.550.000.000		44.005.000.000		46.905.500.000		47.511.135.997		47.794.845.911		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	41.550.000.000	1 Unit Kerja	44.005.000.000	1 Unit Kerja	46.905.500.000	1 Unit Kerja	47.511.135.997	1 Unit Kerja	47.794.845.911		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Pelayanan (Unit Kerja)													
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				281.874.708.973		311.695.819.985		324.675.355.576		327.059.511.829		332.683.242.684		
Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk (Rasio)	5,53	5,65	256.012.380.990	5,89	281.677.309.150	6,01	298.837.730.850	6,13	301.837.730.850	6,25	304.820.914.701	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	Bidang Angkutan
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				1.512.268.460		1.632.268.460		1.512.268.460		1.512.268.460		1.512.268.460		
Terkelolanya Terminal Penumpang Type C	Persentase Arus penumpang orang di Terminal Tipe C	2 %	2 %		2 %		2 %		2 %		2 %			
2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				277.616.460		297.616.460		277.616.460		277.616.460		277.616.460		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)		3 Dokumen	277.616.460	3 Dokumen	297.616.460	3 Dokumen	277.616.460	3 Dokumen	277.616.460	3 Dokumen	277.616.460		
2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C				200.000.000		240.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	20 Orang	20 Orang	200.000.000	20 Orang	240.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.034.652.000		1.094.652.000		1.034.652.000		1.034.652.000		1.034.652.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang	3 Unit	3 Unit	1.034.652.000	3 Unit	1.094.652.000	3 Unit	1.034.652.000	3 Unit	1.034.652.000	3 Unit	1.034.652.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
(Fasilitas Utama dan Penunjang)	terehabilitasi dan terpelihara (Unit)													
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				1.917.359.890		2.117.359.890		1.917.359.890		1.917.359.890		1.917.359.890		
Terselenggaranya Pemantauan angkutan	Persentase penyelenggaraan Pemantauan angkutan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1.917.359.890		2.117.359.890		1.917.359.890		1.917.359.890		1.917.359.890		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1.917.359.890		2.117.359.890	1 Laporan	1.917.359.890	1 Laporan	1.917.359.890	1 Laporan	1.917.359.890		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				251.812.752.640		277.067.680.800		294.638.102.500		297.638.102.500		300.621.286.351		
Meningkatnya jumlah penumpang BRT	Load Factor (%)	72,59 %	74,09 %		74,84 %		75,59 %		76,34 %		77,09 %			
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				251.549.288.840		276.704.217.000		294.374.638.700		297.374.638.700		300.357.822.551		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	281 Unit	281 Unit	251.549.288.840	281 Unit	276.704.217.000	281 Unit	294.374.638.700	281 Unit	297.374.638.700	281 Unit	300.357.822.551		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				263.463.800		363.463.800		263.463.800		263.463.800		263.463.800		
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	263.463.800	1 Laporan	363.463.800	1 Laporan	263.463.800	1 Laporan	263.463.800	1 Laporan	263.463.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				370.000.000		390.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		
Terpenuhinya pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi	Persentase pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi	3 %	3 %		3 %		3 %		3 %		3 %			
2.15.02.2.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				370.000.000		390.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	370.000.000	1 Dokumen	390.000.000	1 Dokumen	370.000.000	1 Dokumen	370.000.000	1 Dokumen	370.000.000		
2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000		470.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terpenuhinya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilaksanakan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam				200.000.000		240.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	240.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000		
2.15.02.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		230.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	230.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Meningkatnya kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik fungsi kendaraan bermotor	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang (%)	1,83 %	1 %	4.695.144.460	1 %	5.015.144.460	1 %	4.695.144.460	1 %	4.695.144.460	1 %	4.695.144.460		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4.470.144.460		4.770.144.460		4.470.144.460		4.470.144.460		4.470.144.460		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan lalu lintas	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	33.51 %	31,51 %		30,51 %		29,51 %		28,51%		27,51 %			
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				3.118.050.000		3.218.050.000		3.118.050.000		3.118.050.000		3.118.050.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	3.118.050.000	12 Laporan	3.218.050.000	12 Laporan	3.118.050.000	12 Laporan	3.118.050.000	12 Laporan	3.118.050.000		
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.277.094.460		1.477.094.460		1.277.094.460		1.277.094.460		1.277.094.460		
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	1.277.094.460	12 Dokumen	1.477.094.460	12 Dokumen	1.277.094.460	12 Dokumen	1.277.094.460	12 Dokumen	1.277.094.460		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terlaksananya penertiban lalu lintas angkutan umum dan barang	Persentase pelaksanaan forum alalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				225.000.000		245.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		
Terlakanaya penyelengaraan pengawasan andalalin	Persentase penyelengaraan pengawasan andalalin	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1 Laporan	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000		
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				150.000.000		170.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000		
Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	71,99 %	72,99 %	18.717.183.523	73,99 %	22.153.366.375	74,99 %	18.692.480.266	75,99 %	18.076.636.519	76,99 %	20.717.183.523		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Pelaksanaan MRLL	Persentase Pelaksanaan MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	4 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000		
2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
2.15.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
2.15.02.2.01.0006 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				12.839.046.523		15.975.229.375		12.814.343.266		12.198.499.519		14.838.046.523		
Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU)	Persentase penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				3.500.000.000		3.800.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		4.700.000.000		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	385 Unit	300 Unit	3.500.000.000	300 Unit	3.800.000.000	300 Unit	3.500.000.000	300 Unit	3.500.000.000	300 Unit	4.700.000.000		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				755.950.000		955.950.000		755.950.000		755.950.000		855.950.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	82 Unit	25 Unit	755.950.000	25 Unit	955.950.000	25 Unit	755.950.000	25 Unit	755.950.000	25 Unit	855.950.000		
Tersedianya perlengkapan jalan	Persentase penyediaan perlengkapan jalan yang terlaksana	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				6.881.096.523		9.417.279.375		6.856.393.266		6.240.549.519		7.480.096.523		
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	17 Unit	52 Unit	6.881.096.523	72 Unit	9.417.279.375	52 Unit	6.856.393.266	47 Unit	6.240.549.519	57 Unit	7.480.096.523		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				1.702.000.000		1.802.000.000		1.702.000.000		1.702.000.000		1.802.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	103 Unit	98 Unit	1.702.000.000	98 Unit	1.802.000.000	98 Unit	1.702.000.000	98 Unit	1.702.000.000	98 Unit	1.802.000.000		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5.428.137.000		5.728.137.000		5.428.137.000		5.428.137.000		5.429.137.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	Persentase penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4.181.137.000		4.381.137.000		4.181.137.000		4.181.137.000		4.181.137.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2 Unit	4 Unit	4.181.137.000	4 Unit	4.381.137.000	4 Unit	4.181.137.000	4 Unit	4.181.137.000	4 Unit	4.181.137.000		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	5.300 Dokumen	5.300 Dokumen	250.000.000	5.300 Dokumen	250.000.000	5.300 Dokumen	250.000.000	5.300 Dokumen	250.000.000	5.300 Dokumen	250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				997.000.000		1.097.000.000		997.000.000		997.000.000		998.000.000		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	35 Unit	31 Unit	997.000.000	31 Unit	1.097.000.000	31 Unit	997.000.000	31 Unit	997.000.000	31 Unit	998.000.000		
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan parkir on the street	Persentase pengelolaan parkir on the street (%)	90,04 %	94 %	2.450.000.000	95 %	2.850.000.000	96 %	2.450.000.000	98 %	2.450.000.000	100 %	2.450.000.000		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				2.450.000.000		2.850.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		
Terlaksananya pendataan parkir	Persentase pemenuhan pendataan parkir	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				300.000.000		400.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya pemungutan retribusi parkir	Persentase pemenuhan pemungutan parkir	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1.600.000.000		1.700.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000	12 Laporan	1.700.000.000	12 Laporan	1.600.000.000	12 Laporan	1.600.000.000	12 Laporan	1.600.000.000		
Terpenuhinya pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Persentase pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.15.02.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				550.000.000		750.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	800 Dokumen	800 Dokumen	550.000.000	800 Dokumen	750.000.000	800 Dokumen	550.000.000	800 Dokumen	550.000.000	800 Dokumen	550.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terintegrasi Secara Elektronik	Secara Elektronik (Dokumen)													

Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan pagu indikatif pada Renstra ini sudah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penyusunan anggaran dan alokasi sumber daya pembangunan, dengan tujuan menciptakan pembangunan yang lebih adil dan setara bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya (anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia). PPRG memastikan bahwa kebutuhan, pengalaman, dan potensi semua gender dipertimbangkan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Manfaat PPRG diantaranya mempercepat terwujudnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Aktualisasi PUG diwujudkan antara lain:

1. Pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang ramah difabel (kursi khusus difabel dan trek khusus difabel di shelter);
2. Tarif khusus BRT untuk lansia dan difabel;
3. Tarif Rp. 0,. Untuk anak pelajar/mahasiswa.

Pengoperasian BRT Trans Semarang dengan tarif yang sangat murah dan terjangkau secara tidak langsung juga turut serta membantu pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Dengan tarif angkutan umum yang terjangkau diharapkan pergerakan orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi dapat dilaksanakan.

Kota Layak Anak (KLA) adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh UNICEF untuk memastikan bahwa kota-kota di dunia ini menjadi tempat yang aman, sehat, dan nyaman bagi anak-anak. Dalam konteks ini, urusan perhubungan memiliki keterkaitan yang erat dengan KLA. Contoh Implementasi KLA dalam Urusan Perhubungan yang tertuang dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra ini antara lain:

1. Penguatan Program Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang bermanfaat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar, meningkatkan aktivitas fisik dan kebiasaan sehat, serta menumbuhkan kesadaran akan keselamatan di jalan;
2. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk penyeberang yang aman dan nyaman bagi anak-anak di sekolah-sekolah.
3. Pengadaan lajur sepeda yang terpisah dari jalan kendaraan, sehingga anak-anak dapat bersepeda dengan aman;
4. Mengoperasikan angkutan umum massal yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi anak-anak melalui pengoperasian BRT Trans Semarang;
5. Mengadakan pendidikan lalu lintas bagi anak-anak, sehingga mereka dapat memahami dan mengikuti aturan lalu lintas dengan baik.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang merupakan rencana pembangunan kependudukan jangka panjang hingga tahun 2045 dan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2022. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pembangunan manusia yang inklusif. Untuk mendukung program-program GDPK yang telah ditetapkan, dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang ini diimplementasikan melalui:

1. Pengoperasian BRT Trans Semarang yang yang melayani daerah sub-sub pengembangan di sekitar pusat pengembangan (Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Genuk, Pedurungan dan Banyumanik) untuk mengurai masalah kemacetan. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut dilalui oleh jalur-jalur transportasi utama Semarang, sehingga pada jam-jam puncak akan terjadi penumpukkan pergerakan pada jalur tersebut. Penumpukan tersebut dikarenakan adanya pertemuan pergerakan antara yang akan melakukan aktivitas di sub pusat pengembangan ataupun ke pusat pengembangan di pusat Kota;
2. Penerapan rekayasa lalu lintas dan pemasangan perlengkapan jalan yang bermanfaat untuk keamanan dan keselamatan pemakai jalan.

Implementasi Smart City dalam program urusan perhubungan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Berikut beberapa contoh implementasi Smart City pada program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang:

1. Sistem Manajemen Lalu Lintas dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan mengatur lalu lintas, sehingga mengurangi kemacetan dan meningkatkan keamanan;
2. Menggunakan aplikasi untuk memantau, mengatur dan membayar layanan angkutan umum, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi penumpang;
3. Menggunakan teknologi untuk membayar retribusi parkir secara non tunai untuk meningkatkan efisiensi bagi masyarakat;
4. Menggunakan teknologi untuk memantau parkir tepi jalan umum, sehingga mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan bagi pengemudi.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*exente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Tujuan: Rasio Konektivitas	rasio	0,88	0,9	0,9	0,91	0,92	0,93	
2	Sasaran: 1) Persentase ruas jalan yang macet	Persen	36,35	36,15	36,05	35,96	35,86	35,76	
	Sasaran: 2) Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum	Persen	61,5	62	62,5	63	63,5	64	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Proporsi penduduk pengguna angkutan umum	%	1,104	1,106	1,154	1,177	1,229	1,284	
2	Persentase ruas jalan rawan macet	%	36,25	36,15	36,05	35,96	35,86	35,75	
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	76,25	77,20	78,15	79,10	80,05	81,00	
4	Tingkat Fatalitas Kecelakaan	%	11,97	11,18	10,51	9,81	9,12	8,75	
5	Rasio Konektivitas	%	0,89	0,90	0,90	0,91	0,92	0,93	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan perhubungan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Permasalahan Dinas Perhubungan Kota Semarang sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan perhubungan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

18. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi. Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governnance*. Sementara itu dalam lingkup lokal Pemerintah Kota Semarang, dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kota Semarang. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Untuk menjaga kesinambungan program pembangunan daerah sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SIstem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan

pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dijelaskan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah harus menyusun rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 akan dimulai dengan Rancangan Teknokratik yang akan disusun pada Tahun 2025 untuk mendukung program Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih. Salah satu pondasi dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD adalah adanya Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, menjadikan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang perlu untuk menyusun Ranwal Renstra yang kemudian dikembangkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) agar dapat memberikan masukan kepada Walikota dan Wakil Walikota Semarang terkait gambaran arah kebijakan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara hierarki akan mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah sehingga akan tercipta dokumen yang selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sama.

1.2. Dasar hukum penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

1.3. Maksud dan tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan dalam Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yaitu:
1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika penulisan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, Bidang Statistik dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, Bidang Statistik dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, Bidang Statistik, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Komunikasi Publik;
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdiri atas :
    a. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik;
6. Bidang Pengelolaan Infrastruktur;
7. Bidang Statistik;
8. UPTD;
9. Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI DINAS

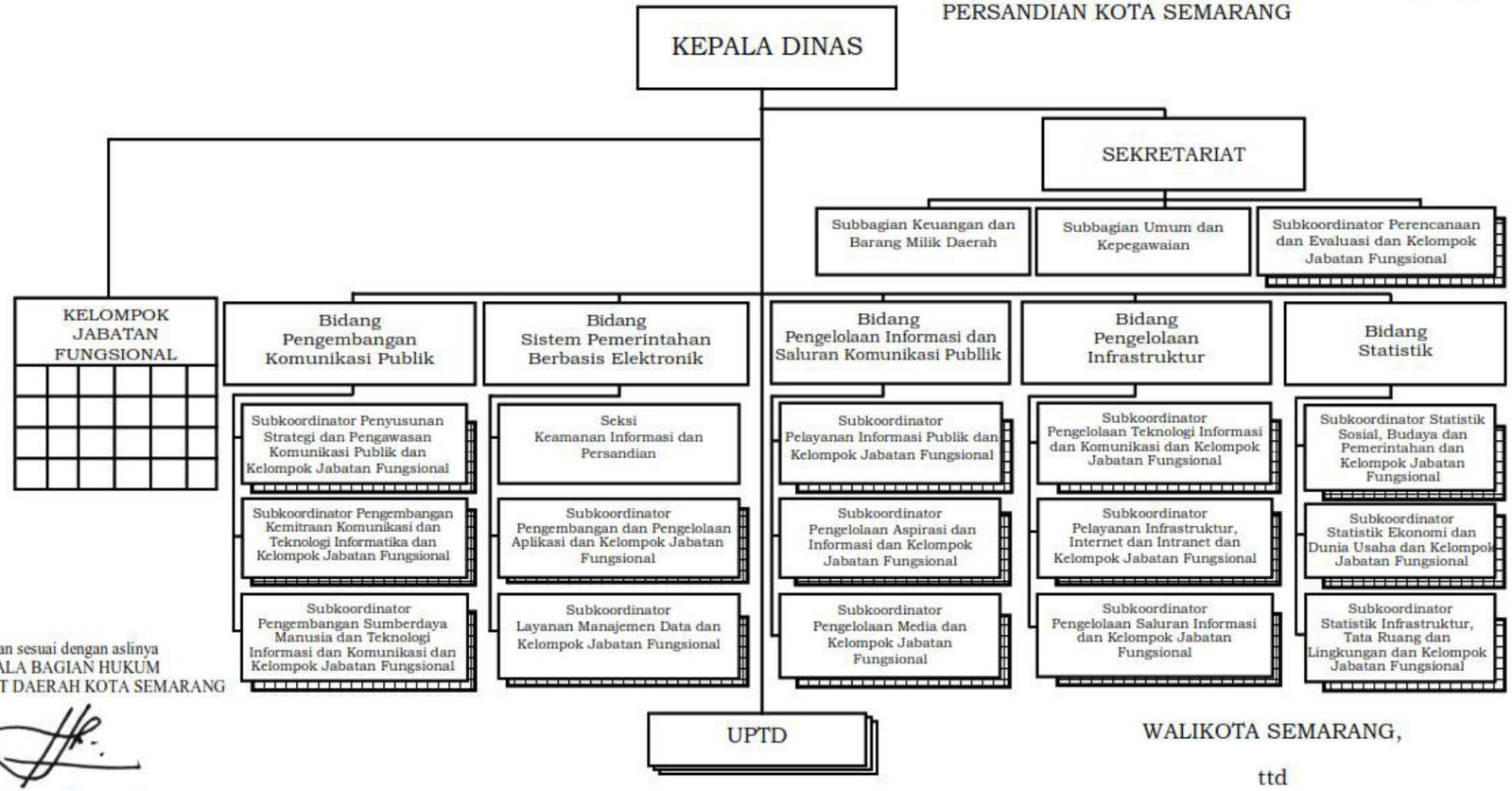

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, Bidang Statistik, dan UPTD;
c. Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Penyusunan Strategi dan Pengawasan Komunikasi Publik, Pengembangan Kemitraan Komunikasi dan Teknologi Informatika, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Keamanan Informasi dan Persandian, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Layanan Manajemen Data;
e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Aspirasi dan Informasi, dan Pengelolaan Media;
f. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Infrastruktur, Internet dan Intranet, dan Pengelolaan Saluran Informasi;
g. Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha, dan Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		PJLP		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	1	0	0	1
2	SMA Sederajat	0	0	15	2	2	0	19
3	D3	14	15	3	1	1	0	34
4	S1	31	19	15	13	2	0	80

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		PJLP		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
5	S2	5	5	0	0	0	0	10
6	S3	0	0	0	0	0	0	0

Dari jumlah pegawai sebanyak 154 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	13	14	27
2	Golongan III	33	21	54
3	Golongan IV	4	4	8
4	Golongan IX	15	13	28
5	Golongan VII PPPK	3	1	4
6	Golongan V PPPK	15	2	17
7	Golongan III PPPK	0	1	1
8	PJLP	5	0	5

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Aset Tanah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan	No.	Nama Barang/ Jenis Barang
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
					N I H I L						

Tabel 2. 4
Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	2.25	Jl. Teuku Umar No. 56 Semarang (Kantor Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang)		Pembelian	167.457,74	Baliho Neon Box LED 4 m x 8 m Tinggi Tiang 5 m
2	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	2.25	Jl. Mataram No. 827 Semarang (SDN Candi 01 Semarang)		Pembelian	167.346,75	Baliho Neon Box LED 4m x 8m Tinggi Tiang 5m
3	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	2.25	Jl. Madukoro Semarang (Rumah Pompa Jl. Madukoro Raya)		Pembelian	186.439,22	Baliho Neon Box LED 4m x 8m Tinggi Tiang 5m
4	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	2.25	Jl. Patimura No.9 Semarang (SMPN 6 Semarang)		Pembelian	174.659,16	Baliho Neon Box LED 4m x8m Tinggi Tiang 5 m
5	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	1	Jl. Pemuda 148 Semarang (Belakang Kantor Diskominfo Semarang)		Pembelian	152.821,40	Baliho Neon Box LED 6m x 3m
6	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	2.25	Jl. Dr. Sutomo Semarang (Taman Kasmaran)		Pembelian	168.281,74	Baliho Neon Box LED 4m x 8m Tinggi Tiang 4m
7	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	1	JL. KOMPAK KEL. GEMAH KEC. PEDURUNGAN		Hibah	17.400,00	BALIHO HIBAH DARI KPU KOTA SEMARANG NO BAST B/04544/030/X/2021
8	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	1	JL. KOMPAK KEL. GEMAH KEC. PEDURUNGAN		Hibah	17.400,00	BALIHO HIBAH DARI KPU KOTA SEMARANG NO BAST B/04544/030/X/2021

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	1	KEL. MANGKANG KULON KEC. TUGU		Hibah	17.400,00	BALIHO HIBAH DARI KPU KOTA SEMARANG NO BAST B/04544/030/X/2021
10	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	1	KEL. MANGKANG KULON KEC. TUGU		Hibah	17.400,00	BALIHO HIBAH DARI KPU KOTA SEMARANG NO BAST B/04544/030/X/2021
11	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	1	JL. SEMARANG BOJA KEC. MIJEN		Hibah	17.400,00	BALIHO HIBAH DARI KPU KOTA SEMARANG NO BAST B/04544/030/X/2021
12	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	1	JL. SEMARANG BOJA KEC. MIJEN		Hibah	17.400,00	BALIHO HIBAH DARI KPU KOTA SEMARANG NO BAST B/04544/030/X/2021
13	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	1	JL. WURYANTO KEL. SUMUREJO KEC. GUNUNGPATI		Hibah	17.400,00	BALIHO HIBAH DARI KPU KOTA SEMARANG NO BAST B/04544/030/X/2021
14	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	1	JL. WURYANTO KEL. SUMUREJO KEC. GUNUNGPATI		Hibah	17.400,00	BALIHO HIBAH DARI KPU KOTA SEMARANG NO BAST B/04544/030/X/2021

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Asal usul	Harga	
1	Papan Visual/Papan Nama	Videotron / Videotron		Metal	Pembelian	2.390.000,00	LED Videotron Outdoor All In One Display 5.0 Digital Signage 220 Inch
2	Papan Visual/Papan Nama	Microvision / Videotron Indoor		Campuran	Pembelian	1.160.000,00	MICROVISION LED VIDEOTRON INDOOR ALL IN ONE DISPLAY 2.5 MEETING ROOM 5760 x 2560 mm (Aula Rumdin Walikota)
3	Papan Visual/Papan Nama	Videotron / VIDEOTRON INDOOR ALL IN ONE DISPLAY		Campuran	Pembelian	1.140.000,00	LED VIDEOTRON INDOOR ALL IN ONE DISPLAY 2.5 MEETING ROOM 5760x2560 (Balaikota)

2.1.3. Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

a. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Tujuan dan Sasaran																		
	Persentase pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemenuhan data dan informasi yang didukung teknologi informasi	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Nilai AKIP perangkat daerah	angka	IKK		76,25	76,38	76,30	76,32	76,35	78,91	78,91	77,31	79,90	80,00	103,49	103,49	101,32	104,69	104,78
	Indikator kinerja kunci																		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	IKK		75	75	75	75	75	75,33	75,95	95,23	95,87	95	75,33	75,95	95,23	95,87	95
	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/ replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	IKK		100	100	100	100	100	75	80	100	100	100	100	75	80	100	100
	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan statistik	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	IKK		100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100
	Indeks domain tata kelola SPBE	angka	IKK		3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	NA	NA	3,80	3,80	3,60	105	100	90	105	100
	Indeks domain layanan SPBE	angka	IKK		4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	NA	NA	3,69	3,69	4,45	87,86	85,81	101,14	87,86	85,81
	Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat penyebarluasan Informasi ke masyarakat	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional	%	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator SPM																		
	Indikator TPB																		

1) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, ditandai diantaranya dengan diterimanya predikat sangat baik untuk Sapa Mbak Ita dari Kementerian Dalam Negeri, Juara I Lomba Pertunjukan Rakyat FK Metra Jawa Tengah 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Juara I Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) oleh UGM, dan Badan Publik Informatif pada Penganugerahan Badan Publik Dalam Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik di Kota Semarang pada tahun 2023 terlaksana forum koordinasi PPID serta pengelolaan Pusat Informasi Publik. Dan sebagai dasar pelaksanaannya telah di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 485.1/122 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022.

Pengelolaan laporan layanan pengaduan yang masuk selama tahun 2024 melalui kanal-kanal yang tersedia telah diterima laporan sebanyak 5.378 menurun dari tahun 2023 sebesar 6.129. Laporan tahun 2024 yang masuk seluruhnya merupakan pengaduan. Sedangkan, tidak ada laporan terkait permintaan informasi dan aspirasi yang masuk. Dari 5.378 laporan, 4.888 laporan atau 90,89% laporan telah selesai, 55 laporan selesai bersyarat, dan 435 laporan masih dalam proses. Lima OPD yang paling banyak mendapat laporan pada tahun 2024 yaitu Dinas Perhubungan dengan 1.150 laporan, Dinas Pekerjaan Umum dengan 1.045 laporan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 763 laporan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 321 laporan, dan Satpol PP dengan 295 laporan. Topik yang paling banyak dilaporkan sepanjang tahun 2024 yaitu jalan rusak 437 laporan, pemangkasan pohon 269 laporan, lampu PJU padam 246 laporan, parkir 226 laporan, dan banjir 216 laporan.

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan pengelolaan dan monitoring evaluasi Pengaduan Call Center 112 Kota Semarang. Panggilan melalui CC 112 selama tahun 2023 sebanyak 26.933, dengan rincian 12.336 yang merupakan panggilan yang valid, 5.938 merupakan prank, 4.201 merupakan ghost dan 4.458 merupakan informasi. Topik panggilan adalah Ambulance Transportasi, Ambulance Transportasi PMI, Pemeriksaan, Home Care, Kecelakaan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Evakuasi Hewan Liar, Gangguan Lalu Lintas, Bencana Alam, Ambulance Jenazah Pmi, Kebakaran, Keamanaan Dan Ketertiban Umum / Masyarakat, Balap Liar, Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar, Pohon Tumbang, Lampu PJU Padam, Tiang Listrik Rubuh (PJU/PLN/Telkom), Kabel Menjuntai, Rescue, Pipa Bocor, Evakuasi Kecelakaan, Kriminalitas, Kerusuhan/Tawuran, Penemuan Mayat, Kekerasan Perempuan/Anak/KDRT, Ambulans Jenazah Disperkim, Covid 19. Kinerja pada urusan komunikasi dan informatika menunjukkan kinerja yang positif, terkait akses internet di OPD, integrasi sistem, cakupan penyebaran dan penyediaan informasi publik serta implementasi masterplan smart city.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, diantaranya: Belum maksimalnya penanganan hoaks di Kota Semarang, terkendalanya koordinasi terkait pelayanan informasi dengan badan vertikal di Kota Semarang, ancaman keamanan informasi yang semakin meningkat seperti hacking, phising, dan deface, serta OPD tidak

memahami proses bisnis dan tidak memiliki dokumentasi saat berkeinginan membuat aplikasi sehingga menyulitkan proses develop sistem.

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026, dan dijabarkan secara lebih rinci dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2024 sebagaimana telah disusun dengan rinci tertuang dalam GAP (Gender Analysis Pathway), GBS (Gender Budget Statement) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berbasis Pengarusutamaan Gender pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024. Pada tahun 2024 yang telah berjalan, terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang turut mendukung pengarusutamaan gender di bidang komunikasi dan informatika, antara lain :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
   Pada Program Informasi dan Komunikasi Publik ini mendukung pengarusutamaan gender dalam hal pengikutsertaan perempuan dalam pelaksanaan workshop/pelatihan konten kreatif, sosialisasi pengelolaan pengaduan dalam bentuk Lapor goes to Campus, Pertunjukan Rakyat Kenduri Seni Forum Komunikasi Media Tradisional (Fk Metra), Roadshow Sosialisasi Keterbukaan Informasi Ke Kecamatan serta Penyediaan informasi publik melalui kanal PPID.
2. Program Aplikasi Informatika
   Pada program ini yang terkait gender adalah dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi terkait gender, Sosialisasi SPBE yang melibatkan perempuan, penyediaan CCTV RT, dan langganan internet yang dapat dinikmati oleh perempuan, difabel, anak, dan lansia.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   Program ini melibatkan gender dalam Koordinasi Sinkronisasi Data Sektoral dengan OPD, bimtek peningkatan SDM pengelolaan data statistik sektoral dan geospasial kepada OPD, Roadshow Monitoring dan Evaluasi Data Sektoral, rapat-rapat koordinasi tentang pengumpulan dan penyusunan data statistik sektoral, workshop walidata pendukung dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
   Pada program ini melibatkan gender dalam sosialisasi keamanan informasi dalam rangka penganggulangan hoax dan penanganan hacker.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Pada program ini melibatkan gender pada rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait, maupun OPD lain, rapat koordinasi penyusunan dokumen, sosialisasi peraturan perundangan, sosialisasi tentang cukai rokok dan pemberantasan rokok illegal.

Dalam mendukung Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah untuk mendukung pelaksanaan promosi KLA yaitu :

1. Lapor Semar Solusi AWP (Sebelumnya Lapor Hendi) adalah sebuah media bagi masyarakat Kota Semarang untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada Walikota Semarang secara langsung melalui aplikasi Lapor Semar Solusi AWP. Lapor Semar Solusi AWP juga melayani semua kalangan dari anak sampai dewasa. Lapor Semar Solusi AWP dapat diakses melalui SMS, WHATSAPP, APLIKASI PLAYSTORE, WEBSITE dan SOSIAL MEDIA.

2. CALL CENTER 112 adalah inovasi Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pelayanan kegawatdaruratan masyarakat Kota Semarang secara lebih cepat. Call Center 112 berdiri dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Melalui Call center 112, masyarakat dalam keadaan darurat dapat memperoleh penanganan kurang dari 20 menit. CALL CENTER 112 juga melayani semua kalangan dari anak sampai dewasa, panggilan ini tersedia selama 24 jam dan bersifat gratis.
3. Lapor Semar Goes to School sebagai kegiatan untuk mempromosikan 3 layanan komunikasi publik yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Semarang yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Lapor Semar Solusi AWP, Layanan Panggilan Kegawatdaruratan Command Center 112, dan Layanan Permohonan Informasi PPID Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang
4. Kegiatan Workshop dengan peserta anak-anak yang bertemakan pencegahan cyber bullying, bijak dalam penggunaan gadget, dan juga film ramah anak.
5. Kegiatan Workshop dengan peserta anak-anak yang bertemakan pencegahan cyber bullying, bijak dalam penggunaan gadget, dan juga film ramah anak.
6. Fasilitas Free Wifi yang disediakan oleh Diskominfo Kota Semarang untuk beberapa fasilitas umum yang ada di Kota Semarang.
7. Fasilitas CCTV yang disediakan oleh Diskominfo Kota Semarang untuk seluruh RT di Kota Semarang.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi Kota Layak Anak yang sedang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang berupa :

1. Publikasi Melalui Media Tradisional yaitu dengan mengadakan pagelaran kesenian tradisional Kenduri Seni. Kegiatan ini diharapkan mampu menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat tentang program program yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Tema yang berkaitan dengan KLA yaitu tema stunting yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023.
2. Kegiatan Edukasi dengan mengadakan workshop bertemakan Film Ramah Anak, Pencegahan Cyber Bullying, dan Bijak Dalam Penggunaan Gadget.
3. Fasilitas layanan informasi di Diskominfo kota semarang bisa diakses secara online melalui website : diskominfo.semarangkota.go.id , atau sosial media Instagram : @diskominfokotasemarang & @semarangpemkot dan juga bisa datang langsung di gedung P3DN.

Ada inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak yaitu:

1. Lapor Semar Goes to School sebagai kegiatan mempromosikan kanal komunikasi publik Diskominfo Kota Semarang yaitu Lapor Semar Solusi AWP, Command Center 112, dan PPID Kota Semarang kepada anak SMP dan SMA
2. Pelibatan untuk anak SMA dan SMK dalam kegiatan magang yang disediakan oleh Diskominfo Kota Semarang
3. Kegiatan workshop TIK di IndigospaceSDK dengan SAKA MILENIAL (Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informatika)

4. Kegiatan workshop bertemakan Film Ramah Anak, Pencegahan Cyber Bullying, dan Bijak Dalam Penggunaan Gadget dengan peserta anak SD & SMP di Kota Semarang
5. Menerima kunjungan dari SD di Kota Semarang dengan memberikan Edukasi mengenai Cara Penggunaan Gadget untuk Anak

2) Capaian Kinerja Pemerintahan Urusan Statistik

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Statistik ditandai dengan prestasi pada tahun 2024, diantaranya dengan diraihnya nilai 3,04 dengan predikat baik pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik RI.

Dasar pelaksanaan pengembangan Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang dan Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Kota Semarang adalah Peraturan Wali Kota No.25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi dukungan terhadap pencapaian sasaran, diantaranya: Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Membangun Metadata Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Pengembangan Infrastruktur, serta Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

Capaian kinerja pemerintahan urusan statistik yaitu tersusunnya Data Statistik Sektoral & penyebarluasan Informasi Geospasial serta terlaksananya pendampingan kepada produsen data dalam penyusunan metadata dan pengajuan rekomendasi statistik.

3) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tingkat keamanan informasi pemerintah di tahun 2023 yaitu sebesar 100% berhasil konsisten mempertahankan prestasi dari tahun 2019. Peningkatan SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikat pada tahun 2023 yang meliputi Pelatihan Internal Audit ISO 27001:2013 dan Awareness of ISO 27001:2022, serta Surveillance I Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Tabel 2. 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**8.364.802.000**	**55.757.301.290**	**55.862.200.047**	**54.366.346.171**	**62.513.806.556**	**4.920.334.794**	**46.351.213.867**	**53.837.760.110**	**52.539.199.629**	**59.729.216.966**	58,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**2.330.838.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**2.115.132.724**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	90,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.300.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	10.799.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	95,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	201.280.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	155.280.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	77,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	141.682.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	141.016.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A	99,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.505.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	20.922.590,00	N/A	N/A	N/A	N/A	97,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.400.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	74.332.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Makanan Dan Minuman	253.034.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	252.748.700,00	N/A	N/A	N/A	N/A	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	396.562.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	396.561.993,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	331.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	266.971.166,00	N/A	N/A	N/A	N/A	80,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	154.250.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	154.200.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	745.825.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	642.300.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	86,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**1.080.282.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**1.022.782.868**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	94,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	67.725.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	67.675.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaann Peralatan Gedung Kantor	25.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	24.449.970,00	N/A	N/A	N/A	N/A	97,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	60.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	58.509.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	97,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	452.436.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	403.628.048,00	N/A	N/A	N/A	N/A	89,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	234.931.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	233.810.850,00	N/A	N/A	N/A	N/A	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	240.190.000	N/A	N/A	N/A	N/A	234.710.000	N/A	N/A	N/A	N/A	97,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN	**13.950.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**10.842.400**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	77,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
Penyusunan Lakip	1.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	830.800	N/A	N/A	N/A	N/A	83,08 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.788.500	N/A	N/A	N/A	N/A	55,03 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	960.650	N/A	N/A	N/A	N/A	73,90 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Renja Skpd	1.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	754.800	N/A	N/A	N/A	N/A	75,48 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Rka Dan Dpa	1.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.655.200	N/A	N/A	N/A	N/A	87,12 %	0%	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Rka Perubahan Dan Dpa Perubahan	5.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.852.450	N/A	N/A	N/A	N/A	88,23 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	**3.154.183.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**3.055.476.390**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	96,87 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	419.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	381.798.700	N/A	N/A	N/A	N/A	90,99 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Informasi Publik	639.950.000	N/A	N/A	N/A	N/A	599.863.100	N/A	N/A	N/A	N/A	93,74 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi	150.833.000	N/A	N/A	N/A	N/A	150.833.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penyebarluasan Informasi	1.929.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.908.449.090	N/A	N/A	N/A	N/A	98,93 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																	
Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan Informatika	14.750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	14.532.500	N/A	N/A	N/A	N/A	98,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI	**948.183.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**942.013.752**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	948.183.000	N/A	N/A	N/A	N/A	942.013.752	N/A	N/A	N/A	N/A	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM OPTIMALISASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	**446.290.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**440.630.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	98,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengembangan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi	446.290.000	N/A	N/A	N/A	N/A	440.630.000	N/A	N/A	N/A	N/A	98,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**13.925.503.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**13.633.426.557**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	97,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	842.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	763.719.500	N/A	N/A	N/A	N/A	90,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi	11.220.820.000	N/A	N/A	N/A	N/A	11.018.833.557	N/A	N/A	N/A	N/A	98,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengendalian Jaringan Komunikasi Dan Informasi	262.020.000	N/A	N/A	N/A	N/A	255.110.500	N/A	N/A	N/A	N/A	97,36 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pengembangan dan Pengelolaan Salutran Komunikasi Dan Informasi	200.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	195.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A	97,95 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaaan Infrastruktur dan TIK	1.399.863.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.399.863.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	**304.776.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**297.810.600**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	97,71 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pengumpulan Dan Penyusunan Data dan Statistik Daerah	470.000	N/A	N/A	N/A	N/A	387.600	N/A	N/A	N/A	N/A	82,47 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Digital	127.325.000	N/A	N/A	N/A	N/A	126.965.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,72 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi Forum Data Statistik Daerah	176.981.000	N/A	N/A	N/A	N/A	170.458.000	N/A	N/A	N/A	N/A	96,31 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PERSANDIAN DAERAH	**86.300.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**86.270.000**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	99,97 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan dan Penataan Sistem Persandian	86.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	86.270.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,97 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**N/A**	**12.791.901.283**	**13.185.573.577**	**15.319.570.307**	**19.318.583.999**	**N/A**	**11.045.074.844**	**12.349.838.520**	**14.555.350.175**	**18.761.318.394**	**N/A**	86,34 %	93,66 %	95,01 %	97,12 %	15,12 %	19,52 %
Perencanaan, Penganggaran, dan	**N/A**	**7.404.098**	**19.537.049**	**22.029.693,00**	**76.341.075**	**N/A**	**2.542.475**	**15.579.750**	**21.502.750**	**77.809.999**	**N/A**	34,34 %	79,74 %	97,61 %	101,92 %	141,05 %	270,89 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	2.073.465	2.055.555	2.994.159	32.363.522	N/A	550.500	2.033.500	2.979.200	32.163.739	N/A	26,55%	98,93%	99,50%	99,38%	341,90%	431,84%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	435.179	3.808.569	4.296.677	5.018.199	N/A	390.000	3.802.250	4.294.000	4.981.778	N/A	89,62%	99,83%	99,94%	99,27%	268,26%	301,30%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	635.750	4.482.399	3.750.617	4.727.379	N/A	510.475	4.303.000	3.708.000	4.708.962	N/A	80,29%	96,00%	98,86%	99,61%	204,92%	252,04%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	N/A	1.836.801	3.808.569	4.296.677	5.018.199	N/A	825.000	161.500	3.927.000	4.903.815	N/A	44,92%	4,24%	91,40%	97,72%	45,65%	758,68%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	N/A	1.232.431	3.052.949	2.177.809	4.727.379	N/A	34.000	2.993.500	2.117.600	4.720.950	N/A	2,76%	98,05%	97,24%	99,86%	78,71%	2932,70%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	1.190.472	2.329.008	4.513.754	24.486.397	N/A	232.500	2.286.000	4.476.950	26.330.755	N/A	19,53%	98,15%	99,18%	107,53%	210,64%	489,07%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**N/A**	**8.300.887.126**	**9.819.829.009**	**11.643.569.719**	**14.632.689.299**	**N/A**	**8.190.644.798**	**9.394.523.812**	**11.314.934.256**	**14.304.081.106**	**N/A**	98,67%	95,67%	97,18%	97,75%	20,85%	20,52%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	7.933.046.345	9.420.277.833	11.226.667.269	14.214.156.000	N/A	7.873.705.658	9.021.289.462	10.947.204.096	13.930.297.486	N/A	99,25%	95,76%	97,51%	98,00%	21,51%	21,06%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	365.160.000	391.080.000	405.600.000	405.600.000	N/A	314.650.000	364.820.000	356.980.000	361.281.340	N/A	86,17%	93,29%	88,01%	89,07%	3,60%	5,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1.316.036	2.787.528	3.401.573	4.600.839	N/A	1.116.000	2.777.550	3.331.640	4.549.500	N/A	84,80%	99,64%	97,94%	98,88%	56,37%	68,46%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	N/A	793.709	2.896.120	5.047.200	4.478.140	N/A	681.640	2.855.800	4.588.520	4.473.780	N/A	85,88%	98,61%	90,91%	99,90%	109,29%	125,71%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	571.036	2.787.528	2.853.677	3.854.320	N/A	491.500	2.781.000	2.830.000	3.479.000	N/A	86,07 %	99,77 %	99,17 %	90,26 %	141,86 %	163,50 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	**199.876.231**	**255.050.000**	**322.752.240**	**384.476.498**	N/A	**199.387.000**	**246.155.000**	**298.218.900**	**381.610.100**	N/A	99,76 %	96,51 %	92,40 %	99,25 %	24,42 %	24,19 %
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	199.876.231	255.050.000	322.752.240	384.476.498	N/A	199.387.000	246.155.000	298.218.900	381.610.100	N/A	99,76 %	96,51 %	92,40 %	99,25 %	24,42 %	24,19 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**N/A**	**2.518.682.388**	**1.059.086.801**	**1.524.963.981**	**1.196.824.141**	**N/A**	**1.615.625.535**	**1.006.578.214**	**1.394.694.721**	**1.149.415.032**	**N/A**	64,15 %	95,04 %	91,46 %	96,04 %	-11,83 %	-5,58%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	0,00	18.777.550	39.105.194	190.909.040	N/A	0,00	18.555.000	38.481.100	190.441.590	N/A	0,00 %	98,81 %	98,40 %	99,76 %	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	274.113.732	109.039.890	258.035.402	200.402.048	N/A	184.250.000	108.649.090	216.510.000	196.250.000	N/A	67,22 %	99,64 %	83,91 %	97,93 %	18,03 %	16,30 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	N/A	44.932.805	48.886.000	37.675.842	36.496.447	N/A	42.936.400	35.829.450	37.153.900	36.319.000	N/A	95,56 %	73,29 %	98,61 %	99,51 %	-5,75%	-5,03%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	78.904.213	68.725.647	53.659.769	55.852.207	N/A	78.297.950	58.734.013	49.026.333	55.848.331	N/A	99,23 %	85,46 %	91,37 %	99,99 %	-10,25 %	-9,20%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	17.999.210	26.868.514	17.440.487	14.966.724	N/A	16.193.500	16.755.500	16.325.250	14.901.150	N/A	89,97 %	62,36 %	93,61 %	99,56 %	0,00%	-2,61%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	0,00	0,00	4.785.654	0,00	N/A	0,00	0,00	4.262.400	0,00	N/A	0,00 %	0,00%	89,07 %	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	143.990.000	93.261.200	142.714.500	148.422.099	N/A	110.681.500	74.528.063	87.419.833	147.814.675	N/A	76,87 %	79,91 %	61,26 %	99,59 %	7,27%	17,91 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	227.476.000	166.058.000	242.002.441	200.718.720	N/A	130.512.185	166.057.098	238.244.616	195.063.286	N/A	57,37%	100,00%	98,45%	97,18%	0,56%	17,53%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1.731.266.428	527.470.000	729.544.692	349.056.856	N/A	1.052.754.000	527.470.000	707.271.289	312.777.000	N/A	60,81%	100,00%	96,95%	89,61%	-27,79%	-23,86%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**N/A**	**189.991.740**	**255.622.586**	**276.184.618**	**1.637.169.819**	**N/A**	**97.758.500**	**241.136.520**	**242.321.350**	**1.613.761.560**	**N/A**	51,45%	94,33%	87,74%	98,57%	178,46%	237,71%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	0,00	0,00	0,00	1.419.950.000	N/A	0,00	0,00	0,00	1.419.275.000	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	N/A	42.283.740	147.208.314	137.592.683	112.553.079	N/A	40.225.000	133.509.450	109.353.350	94.500.000	N/A	95,13%	90,69%	79,48%	83,96%	74,47%	66,74%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	147.708.000	45.880.452	138.591.935	104.666.740	N/A	57.533.500	45.093.250	132.968.000	99.986.560	N/A	38,95%	98,28%	95,94%	95,53%	36,22%	49,48%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	0,00	62.533.820	0,00	0,00	N/A	0,00	62.533.820	0,00	0,00	N/A	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**N/A**	**357.410.400**	**463.601.442**	**469.690.524**	**468.085.992**	**N/A**	**297.587.614**	**305.635.880**	**427.635.162**	**465.868.094**	**N/A**	83,26%	65,93%	91,05%	99,53%	10,23%	17,19%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	0,00	14.531.202	18.667.000	13.640.000	N/A	0,00	13.330.000	18.655.000	13.337.000	N/A	0,00%	91,73%	99,94%	97,78%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	357.410.400	449.070.240	451.023.524	454.445.992	N/A	297.587.614	292.305.880	408.980.162	452.531.094	N/A	83,26%	65,09%	90,68%	99,58%	8,95%	16,26%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**N/A**	**1.217.649.300**	**1.312.846.690**	**1.060.379.532**	**922.997.175**	**N/A**	**641.528.922**	**1.140.229.344**	**856.043.036**	**768.772.503**	**N/A**	52,69%	86,85%	80,73%	83,29%	-8,12%	14,21%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	300.223.000	39.949.998	40.313.180	39.910.050	N/A	236.099.581	37.431.035	32.955.571	39.910.050	N/A	78,64%	93,69%	81,75%	100,00%	-28,93%	-25,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	202.472.000	421.321.110	462.700.491	458.855.256	N/A	128.363.941	342.988.355	341.718.039	352.863.889	N/A	63,40%	81,41%	73,85%	76,90%	39,03%	56,70%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	N/A	0,00	32.500.000	36.504.000	50.000.000	N/A	0,00	11.295.650	15.209.387	28.876.844	N/A	0,00%	34,76%	41,66%	57,75%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Mebel	N/A	9.944.000	29.415.000	7.272.000	0,00	N/A	9.322.000	28.737.900	0,00	0,00	N/A	93,74%	97,70%	0,00%	0,00%	6,84%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	9.108.000	128.879.000	130.474.000	122.273.929	N/A	1.925.000	69.265.450	101.368.800	101.444.650	N/A	21,14%	53,74%	77,69%	82,97%	436,65%	1181,54%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	N/A	0,00	5.017.000	34.513.862	0,00	N/A	0,00	4.724.000	21.291.033	0,00	N/A	0,00%	94,16%	61,69%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	695.902.300	655.764.582	348.601.999	251.957.940	N/A	265.818.400	645.786.954	343.500.206	245.677.070	N/A	38,20%	98,48%	98,54%	97,51%	-26,78%	22,55%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**N/A**	**5.415.492.647**	**6.485.474.814**	**6.377.562.562**	**9.853.778.662**	**N/A**	**4.463.662.854**	**5.878.784.168**	**6.096.295.891**	**9.476.664.277**	**N/A**	82,42%	90,65%	95,59%	96,17%	24,20%	30,28%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**N/A**	**5.415.492.647**	**6.485.474.814**	**6.377.562.562**	**9.853.778.662**	**N/A**	**4.463.662.854**	**5.878.784.168**	**6.096.295.891**	**9.476.664.277**	**N/A**	82,42%	90,65%	95,59%	96,17%	24,20%	30,28%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	N/A	0,00	129.535.000	150.000.000	179.590.000	N/A	0,00	123.974.000	136.599.050	176.419.250	N/A	0,00%	95,71%	91,07%	98,23%	0,00%	0,00%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	N/A	1.742.778.673	1.785.972.200	1.430.614.180	1.513.218.100	N/A	1.413.699.600	1.717.082.713	1.392.619.698	1.478.180.501	N/A	81,12%	96,14%	97,34%	97,68%	-3,88%	2,90%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	N/A	2.132.196.120	3.077.207.812	3.019.109.470	6.031.071.650	N/A	1.786.117.650	2.835.110.143	2.996.414.020	5.828.219.012	N/A	83,77%	92,13%	99,25%	96,64%	47,40%	52,98%
Pelayanan Informasi Publik	N/A	681.541.327	741.001.000	941.202.983	1.141.202.983	N/A	606.920.501	575.426.074	888.895.108	1.076.296.109	N/A	89,05%	77,66%	94,44%	94,31%	19,00%	23,46%
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	N/A	190.995.740	0,00	0,00	0,00	N/A	128.658.005	0,00	0,00	0,00	N/A	67,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	N/A	148.282.695	314.806.574	303.600.000	525.202.870	N/A	115.253.000	225.947.750	265.533.500	488.039.100	N/A	77,73%	71,77%	87,46%	92,92%	60,58%	65,79%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	N/A	519.698.092	436.952.228	533.035.929	463.493.059	N/A	413.014.098	401.243.488	416.234.515	429.510.305	N/A	79,47%	91,83%	78,09%	92,67%	-2,33%	1,36%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**N/A**	**37.549.907.360**	**36.191.151.656**	**32.669.213.302**	**33.341.443.895**	**N/A**	**30.842.476.169**	**35.609.137.422**	**31.887.553.563**	**31.491.234.295**	**N/A**	82,14%	98,39%	97,61%	94,45%	-3,76%	1,25%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**N/A**	**18.465.136.639**	**22.773.574.959**	**25.277.557.678**	**25.974.280.717**	**N/A**	**16.274.997.184**	**22.348.973.479**	**24.718.202.906**	**24.360.194.421**	**N/A**	88,14%	98,14%	97,79%	93,79%	12,36%	15,49%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	N/A	0,00	939.204.282	1.818.917.309	1.333.367.671	N/A	0,00	823.354.305	1.592.151.497	1.325.807.751	N/A	0,00 %	87,67 %	87,53 %	99,43 %	0,00%	0,00%
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Dadeah Kabupaten/Kota	N/A	0,00	281.722.700	534.463.968	1.773.727.028	N/A	0,00	199.712.706	527.113.180	1.708.500.000	N/A	0,00 %	70,89 %	98,62 %	96,32 %	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	N/A	18.465.136.639	21.552.647.977	22.924.176.401	22.867.186.018	N/A	16.274.997.184	21.325.906.468	22.598.938.229	21.325.886.670	N/A	88,14 %	98,95 %	98,58 %	93,26 %	7,61%	10,46 %
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**N/A**	**19.084.770.721**	**13.417.576.697**	**7.391.655.624**	**7.367.163.178**	**N/A**	**14.567.478.985**	**13.260.163.943**	**7.169.350.657**	**7.131.039.874**	**N/A**	76,33 %	98,83 %	96,99 %	96,79 %	-24,98 %	-18,48 %
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	N/A	11.570.797.323	194.700.000	0,00	0,00	N/A	7.728.711.120	194.700.000	0,00	0,00	N/A	66,79 %	100,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	N/A	1.365.787.330	0,00	0,00	0,00	N/A	1.290.502.400	0,00	0,00	0,00	N/A	94,49 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A	1.507.511.000	1.273.577.440	2.062.361.570	1.975.111.710	N/A	1.314.548.542	1.265.804.932	2.042.355.047	1.971.228.176	N/A	87,20 %	99,39 %	99,03 %	99,80 %	14,06 %	18,05 %
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	N/A	2.807.948.182	645.546.020	875.649.010	803.550.000	N/A	2.685.988.900	616.956.271	853.258.138	800.004.072	N/A	95,66 %	95,57 %	97,44 %	99,56 %	-16,53 %	-14,99 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	N/A	1.704.178.522	11.175.467.707	4.262.023.204	4.396.879.628	N/A	1.425.498.023	11.056.839.700	4.086.254.107	4.168.240.038	N/A	83,65 %	98,94 %	95,88 %	94,80 %	165,69 %	204,87 %
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	N/A	128.548.364	128.285.530	191.621.840	191.621.840	N/A	122.230.000	125.863.040	187.483.365	191.567.588	N/A	95,08 %	98,11 %	97,84 %	99,97 %	16,39 %	18,04 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**N/A**	**1.402.800.000**	**1.064.655.888**	**578.210.608**	**694.303.608**	**N/A**	**1.157.939.556**	**1.037.332.553**	**574.779.303**	**687.165.556**	**N/A**	82,54 %	97,43 %	99,41 %	98,97 %	-16,57 %	-11,82 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KAABUPATEN/KOTA	**N/A**	**1.402.800.000**	**1.064.655.888**	**578.210.608**	**694.303.608**	**N/A**	**1.157.939.556**	**1.037.332.553**	**574.779.303**	**687.165.556**	**N/A**	82,54 %	97,43 %	99,41 %	98,97 %	-16,57 %	-11,82 %
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**N/A**	**1.402.800.000**	**1.064.655.888**	**578.210.608**	**694.303.608**	**N/A**	**1.157.939.556**	**1.037.332.553**	**574.779.303**	**687.165.556**	**N/A**	82,54 %	97,43 %	99,41 %	98,97 %	-16,57 %	-11,82 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	N/A	299.800.000	252.000.000	120.000.000	120.000.000	N/A	278.567.150	246.872.574	119.840.310	119.972.800	N/A	92,92 %	97,97 %	99,87 %	99,98 %	-22,77 %	-20,91 %
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	N/A	72.500.000	155.000.000	80.000.000	80.000.000	N/A	15.472.400	147.696.714	79.866.100	79.979.820	N/A	21,34 %	95,29 %	99,83 %	99,97 %	21,80 %	269,60 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Membangun Metadata Statistik Sektoral	N/A	97.000.000	123.000.000	82.000.000	82.000.000	N/A	86.052.050	121.185.768	81.309.800	81.429.500	N/A	88,71%	98,53%	99,16%	99,30%	-2,18%	2,69%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	N/A	153.500.000	70.000.000	57.207.000	173.300.000	N/A	57.207.100	69.419.579	57.076.718	167.666.151	N/A	37,27%	99,17%	99,77%	96,75%	43,42%	65,77%
Pengembangan Infrastruktur	N/A	100.000.000	310.390.880	163.000.000	163.000.000	N/A	83.235.656	303.605.572	161.167.800	162.121.220	N/A	83,24%	97,81%	98,88%	99,46%	54,30%	72,81%
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	N/A	680.000.000	154.265.008	76.003.608	76.003.608	N/A	637.405.200	148.552.346	75.518.575	75.996.065	N/A	93,74%	96,30%	99,36%	99,99%	-42,68%	-41,74%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**N/A**	**479.981.672**	**668.112.750**	**730.921.720**	**794.471.670**	**N/A**	**447.180.479**	**644.318.550**	**725.801.800**	**790.720.626**	**N/A**	93,17%	96,44%	99,30%	99,53%	19,10%	21,89%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**N/A**	**479.981.672**	**668.112.750**	**730.921.720**	**794.471.670**	**N/A**	**447.180.479**	**644.318.550**	**725.801.800**	**790.720.626**	**N/A**	93,17%	96,44%	99,30%	99,53%	19,10%	21,89%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**N/A**	**479.981.672**	**668.112.750**	**730.921.720**	**794.471.670**	**N/A**	**447.180.479**	**644.318.550**	**725.801.800**	**790.720.626**	**N/A**	93,17%	96,44%	99,30%	99,53%	19,10%	21,89%
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	N/A	479.981.672	668.112.750	730.921.720	794.471.670	N/A	447.180.479	644.318.550	725.801.800	790.720.626	N/A	93,17%	96,44%	99,30%	99,53%	19,10%	21,89%

c. Kerjasama/Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mempunyai mitra diantaranya yaitu :

1. Lembaga/Kementerian Pusat, diantaranya Kementerian Komunikasi Digital, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dll;
2. Lembaga/Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dll;
3. Pihak swasta, diantaranya PT. Parsaoran Global Datatrans/HSPNet (menyediakan internet monitoring CCTV, internet kelurahan), PT. Internet Mulia Untuk Negeri/Nexa (menyediakan bandwith regular), PT. Komunikasi Lintas Nusa/KLN (menyediakan backup bandwith), PT. Indonesia Comnets Plus/Icon+ (menyediakan free wifi tempat publik), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (menyediakan langganan IP publik), PT. Data Labs Analytic (menyediakan langganan Google Cloud Platform), PT. Aku Mitra Digital (menyediakan layanan DRC Alibaba), PT. Smartfren (menyediakan langganan zoom meeting), dll.

d. Inovasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Semarang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terus melakukan pengembangan berbagai invensi dan inovasi lokal. Inovasi tersebut dirancang untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat di era digital, memperkuat infrastruktur TIK, serta mendorong implementasi konsep Smart City di berbagai sektor kehidupan.

Pencapaian inovasi ini merupakan hasil kolaborasi lintas bidang dalam lingkungan Diskominfo Kota Semarang, dengan melibatkan pemanfaatan teknologi terkini seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), layanan pengaduan berbasis digital, serta sistem keamanan siber. Inovasi-inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat, namun juga menjadi bagian dari strategi digitalisasi pemerintahan untuk mewujudkan Kota Semarang yang lebih cerdas, responsif, dan berdaya saing.

Adapun daftar invensi inovasi lokal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang tahun 2024 adalah sebagai berikut:.

1. Pantau Semar
   Sistem pemantauan berbasis CCTV yang digunakan untuk memonitor kondisi kota Semarang baik lalu lintas, titik banjir,TPS, serta pemukiman hingga ke RT/RW yang dapat dilihat secara online melalui https://pantausemar.semarangkota.go.id/.
2. Kanal Pengaduan Sapa Mbak Ita
   Aplikasi pengaduan masyarakat yang menjadi wadah interaktif bagi warga Kota Semarang untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan terkait pelayanan publik. Setiap aduan yang masuk langsung

ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga meningkatkan efektivitas dan transparansi penyelesaian masalah.

3. *Call Center* 112
   Layanan darurat terpadu yang dapat diakses masyarakat secara gratis selama 24 jam. *Call Center* 112 mengintegrasikan berbagai layanan darurat seperti kebakaran, kesehatan, kecelakaan, bencana, maupun keamanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pertolongan cepat dalam kondisi kritis.
4. Layanan Aduan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)
   Layanan khusus untuk menangani laporan insiden keamanan siber yang berpotensi mengganggu sistem elektronik dan data pemerintah daerah. Melalui CSIRT (https://csirt.semarangkota.go.id/) , Diskominfo memberikan perlindungan, respon cepat, serta pemulihan terhadap insiden siber, sehingga keamanan data pemerintah dan masyarakat tetap terjamin.
5. IoTani Semar
   Urban farming di Kota Semarang muncul sebagai solusi menghadapi keterbatasan lahan pertanian dan upaya menjaga ketahanan pangan perkotaan. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan pertanian secara otomatis dan efektif. Penggunaan sensor kelembaban tanah, suhu, dan kondisi cuaca memungkinkan petani dan masyarakat untuk merawat tanaman dengan optimal, bahkan dari jarak jauh..
6. AISSA (*Artificial Intelligence* Solusi Sampah)
   Inovasi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi keberadaan sampah di TPS secara otomatis melalui kamera CCTV. AISSA melalui Pantau Semar (https://pantausemar.semarangkota.go.id/analitik) mampu mengidentifikasi kondisi kontainer penuh atau sampah berserakan, kemudian mengirimkan notifikasi ke petugas lapangan dan dinas terkait untuk segera ditangani, sehingga kebersihan kota lebih terjaga.
7. SAVIRA (*Semarang Virtual Assistant*)
   Layanan asisten virtual berbasis *Whatsapp chatbot* yang berfungsi memberikan informasi layanan publik, agenda kota, serta panduan akses aplikasi digital Pemerintah Kota Semarang. SAVIRA dirancang untuk melayani masyarakat secara cepat, interaktif, dan tanpa batas waktu.

e. Penghargaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Dalam kurun waktu tahun 2021-2024 berbagai penghargaan telah diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang terkait tugas dan fungsinya, baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu diantaranya sebagai berikut :

No.	Nama Penghargaan	Tahun	Pemberi	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Regional)	Ket.
1.	Wali kota Semarang menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2021 kategori layanan publik	2021	MNC Portal	Nasional	
2.	Penghargaan atas kinerja dalam membangun Smart City dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat	2021	Jaringan Media Siber Indonesia	Nasional	

No.	Nama Penghargaan	Tahun	Pemberi	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Regional)	Ket.
3.	Penghargaan Kategori Kepala Daerah Responsif terhadap Pengaduan Masyarakat.	2021	Jawa Pos Radar Semarang	Jawa Tengah	
4.	Penghargaan Komisi Informasi Provinsi sebagai Kota Informatif Adikarya Tinarbuka	2021	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	
5.	Predikat Outstanding Achievement Sistem Pengelolaan Pengaduan tahun 2020 juara 3	2021	Kementrian PAN & RB	Nasional	
6.	Implementasi Smart City Terbaik Tahun 2022	2022	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nasional	Kategori "Smart Economy"
7.	Pemerintah Kota Semarang Sebagai Kota Informatif dalam Menyampaikan, Menyediakan, dan Menguasai Informasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2022	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Kategori Informatif
8.	Lomba Pertunjukan Rakyat FK Metra	2022	Provinsi Jawa Tengah	Regional	Juara 3
9.	Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang	2022	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Regional	Predikat Optimum
10.	Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang	2022	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Regional	Skor Kematangan 89,58% (Tertinggi)
11.	Digital Government Award Tahun 2023	2023	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)	Nasional	Kategori Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
12.	Implementasi Program Smart City Tahun 2023	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nasional	Kategori "Smart Economy dan Smart Living"
13.	Instansi Teraktif dalam Pendaftaran PSE Lingkup Publik Tingkat Pemerintah Kota Tahun 2023	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nasional	Kategori “Instansti Terbaik Pertama”
14.	ITE 2023 Appreciation	2023	kolaborasi APEKSI bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan PT Napindo Media Ashatama	Nasional	Government Support
15.	Penghargaan Mitra Pemberdayaan Komunitas TIK	2023	Relawan TIK Indonesia	Nasional	Mitra Pemberdayaan Komunitas TIK Terbaik
16.	Inovative Government Award	2023	Kementerian Dalam Negeri	Nasional	Inovasi Digitalisasi Pelayanan
17.	Penghargaan Indeks Masyarakat Digital Indoneesia	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nasional	Digitalisasi Masyarakat
18.	Lomba Pertunjukan Rakyat Forum Kesenian Media Tradisional Tahun 2023	2023	Dinas Kominfo Jawa Tengah	Regional	Juara 2

No.	Nama Penghargaan	Tahun	Pemberi	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Regional)	Ket.
19.	Penganugerahan Badan Publik Dalam Keterbukaan Informasi Publik	2023	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Badan Publik Informatif
20.	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Regional	Predikat Optimum
21.	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Regional	Skor Kematangan 86,25%
22.	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2023	Badan Pusat Statistik Republik Indonesia	Nasional	Terbaik ke 2 se – Jawa Tengah
23.	Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	2023	Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Penilaian Keamanan Informasi dengan Indeks Kemanan Informasi
24.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah T.A 2023	2023	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Nasional	(Cyber Security Maturity) oleh BSSN, level 4
25.	Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	2023	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Nasional	Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Semarang yaitu Cukup
25.	Sapa Mbak Ita Raih Predikat Sangat Baik	2024	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	
27.	Lomba Pertunjukan Rakyat FK Metra Jawa Tengah 2024	2024	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Regional	Kota Semarang Raih Juara 1
28.	Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI)	2024	UGM	Nasional	Pemerintah Kota Semarang mendapat Juara 1
29.	Penganugerahan Badan Publik Dalam Keterbukaan Informasi Publik	2024	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Badan Publik Informatif
30.	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	2024	Badan Pusat Statistik RI	Nasional	Nilai 3,04 dengan Predikat “Baik”
31.	Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	2024	Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Penilaian Keamanan Informasi dengan Indeks Keamanan Informasi dengan nilai Tingkat Kesiapan PSE dalam Pemenuhan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 : 608 (Baik) dari maksimal 645
32.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah T.A 2023	2024	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Nasional	(Cyber Security Maturity) oleh BSSN, dengan Total Score Indeks Kematangan

No.	Nama Penghargaan	Tahun	Pemberi	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Regional)	Ket.
					adalah 4,15 dengan Level Kematangan 4
33.	Evaluasi Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2024	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Nasional	Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan skor 78,313 dengan status tingkat kepatuhan "Cukup"

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

- Menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dengan kepentingan masyarakat setempat terkait dampak lingkungan;
- Keterbatasan anggaran APBD dalam memenuhi permintaan pelatihan TIK yang tinggi dari masyarakat;
- Kerentanan keamanan informasi dapat disebabkan oleh kekurangan dalam pengembangan aplikasi, celah keamanan data yang tidak terdeteksi, atau serangan siber;
- Kurangnya standar interoperabilitas, kurangnya integrasi yang memadai, atau kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak;
- Belum adanya dokumentasi proses bisnis pada OPD untuk mendukung pengembangan aplikasi yang berkelanjutan;
- Kompleksitas Integrasi Sistem: Mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi yang sudah ada membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan;
- Rekapitulasi laporan permohonan informasi pada whatsapp PPID masih manual;
- Perlunya pelatihan TIK bagi perempuan dan pelajar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi perempuan dan pelajar dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- Belum adanya Notifikasi permohonan Informasi dari website SILINTAS ke WA admin PPID di setiap OPD;
- Kurangnya Sosialisasi ke Masyarakat mengenai perbedaan 3 (tiga) kanal pelayanan Permohonan Informasi, Pengaduan, dan Kegawatdaruratan yang dimiliki Pemkot semarang;
- perlunya MoU tentang tukar menukar informasi dengan badan vertikal yang berada di kota semarang;
- Perlu adanya penambahan alokasi bandwith untuk kantor UPTD/OPD yang baru;

- Kurang diperhatikannya penataan kondisi LAN (*Local Area Network*) oleh masing-masing OPD/UPTD sehingga menyebabkan bandwidth tidak terdeliveri secara merata dan maksimal;
- Perlu penambahan jumlah titik internet monitoring CCTV RT;
- Perlu dibangun jaringan infrastruktur jaringan Fiber Optik milik Pemkot untuk mensupport OPD/UPTD yang belum terlayani internet;
- Menertibkan opertor telekomunikasi, serta pembangunan fasilitas ducting kabel fiber optik;
- Adanya penilaian EPSS yang menitikberatkan pada adanya regulasi sebagai dasar penyelenggaraan yang menjai salah satu IKU dari Kepala Daerah;
- Adanya penilaian Bhumandala Awards yang menitikberatkan pada adanya regulasi sebagai dasar penyelenggaraan;
- Adanya penilaian penyelenggaraan SDI tingkat se Jawa Tengah, pemberian peringkat terhadap penyusunan metadata se- Jawa Tengah di aplikasi OMAE;
- Tim pengelola data pada masing-masing OPD yang sering berganti personil;
- Adanya penyeragaman pada e-database SIPD.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- Optimalisasi sistem perizinan yang transparan dan partisipatif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penempatan menara telekomunikasi;
- Peningkatan literasi digital masyarakat melalui program pelatihan TIK yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor;
- Pemindaian kerentanan keamanan aplikasi secara berkala yang ditindaklajuti oleh OPD terkait sesuai Kebijakan Keamanan Informasi;
- Kolaborasi Antar Instansi: SPBE memungkinkan integrasi dan kolaborasi yang lebih baik antar instansi pemerintahan;
- Proses bisnis pada OPD yang sudah berjalan perlu dokumentasi secara sistematis;
- Implementasi Big Data dan AI: Penggunaan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk analisis data yang lebih mendalam dan prediktif;
- Proses otomatisasi dapat mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan rekapitulasi laporan. Ini membantu mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan produktivitas admin PPID;
- Peningkatan partisipasi perempuan dan pelajar dalam pembangunan daerah khususnya di bidang TIK;
- Dengan adanya notifikasi, Admin PPID akan mendapatkan pemberiTahunan secara langsung melalui WhatsApp setiap kali ada permohonan informasi baru melalui website SILINTAS. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat dan tepat waktu;
- Dengan adanya edukasi ke Masyarakat memungkinkan masyarakat untuk menggunakan platform online dengan lebih efektif dan efisien dalam mengajukan permohonan informasi, sehingga mempermudah proses mereka dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan;

- Kerja sama dengan badan vertikal terkait dengan layanan informasi publik dan klarifikasi berita bohong atau HOAX;
- Dengan terbangunnya infrastruktur jaringan fiber optik nantinya internet bisa stabil dan bisa menggunakan jaringan local selain bisa di monitoring penggunaan bandwithnya kita juga mudah dalam melakukan troubleshooting jika terdapat kerusakan perangkatnya;
- Mengoptimalkan penataan jaringan LAN serta melakukanPenambahan bandwith internet untuk OPD/UPTD memerlukan penambahan anggaran
- Internet monitoring CCTV RT sangat membantu warga dalam TIK;
- Dengan dibangunnya free wifi di area publik,bisa memberikan layanan internet gratis kepada warga masyarakat sehingga dapat memanfaatkannya;
- Membangun ducting kabel Fiber Optik diseluruh Kota Semarang;
- Koordinasi yang baik dengan Kementerian terkait, BPS RI, BPS Kota Semarang, Bagian Hukum, dan OPD;
- Koordinasi yang baik dengan BIG, Bagian Hukum dan OPD;
- OPD telah mengumpulkan daftar kegiatan yang bisa diajukan rekomendasi kegiatan statistik, serta disusun metadata kegiatan statistiknya;
- Koordinasi yang baik dengan BPS Kota Semarang dan OPD;
- Koordinasi yang baik dengan OPD selaku produsen data;

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu: **“Belum optimalnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan masyarakat terkait komunikasi dan informasi publik	• Belum optimalnya kualitas penyusunan strategi komunikasi publik • Belum optimalnya pengembangan kemitraan di bidang komunikasi dan teknologi informatika • Belum optimalnya pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
2	Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi dan saluran komunikasi publik	• Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik dalam penyampaian informasi kepada masyarakat • Belum optimalnya kualitas pengelolaan aspirasi masyarakat dan penyampaian informasi • Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik dalam mendukung penyebaran informasi
3	Belum optimalnya layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang memadai	• Belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pemerintahan digital • Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur TIK dalam menunjang pelayanan publik dan pemerintahan • Belum optimalnya kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur internet dan intranet dalam mendukung konektivitas layanan pemerintahan
4	Belum optimalnya layanan pengelolaan e-government dan integrasi aplikasi	• Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan aplikasi layanan publik yang terintegrasi • Belum optimalnya pengelolaan layanan manajemen data pemerintahan yang terintegrasi
5	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral	• Belum optimalnya kualitas data statistik sektoral • Belum optimalnya pemanfaatan dan diseminasi data statistik sektoral • Belum optimalnya mutu tata kelola data statistik sektoral
6	Belum optimalnya perlindungan data dan informasi	• Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dirincikan sebagai berikut:

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

Isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu global, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

a. Isu Strategis Global

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan logi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of RANCANGAN RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029 II-276 *Things* (IoT), *blockchain*, *teknoHyper Connection, Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automstion* (RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan teknologi

secara optimal diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Disrupsi teknologi akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan di masa depan, diantaranya:

1. Digitalisasi usaha pada UMKM dan koperasi dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha;
2. Sektor manufaktur mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi, serta teknologi hijau termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan;
3. Sektor pendidikan meliputi inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *Artificial Intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu;
4. Tergantikannya industri media dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence),* termasuk pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) yang berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan;
5. Pengusaha properti perkantoran dan real estate dapat terdampak akibat dari perkembangan pekerjaan dengan metode jarak jauh *(remote working)* atau *work from anywhere* (WFA);
6. Cara kerja pemerintah yang dapat terdampak dengan adanya peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya;
7. Proses pembenahan perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi dapat terbantu dengan perkembangan teknologi menjadi lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.

b. Telaahan RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN tahun 2025-2029 disebutkan bahwa penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital menjadi aspek fundamental, dengan fokus pada pelatihan berbasis teknologi, dan pengelolaan layanan digital secara profesional. Transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antar instansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.

Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien melalui (a) penguatan tata kelola pemerintah digital, (b) penguatan teknologi pemerintah digital, (c) pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi digital layanan publik prioritas serta (e) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Melalui program pemerintah digital diharapkan tercipta fondasi yang kuat untuk mendukung

reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Dengan teknologi yang andal, data yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, serta layanan publik yang modern, pemerintah digital memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan nasional.

c. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat;
2. Meningkatnya layanan statistik berbasis teknologi informasi yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Meningkatnya keamanan data dan informasi; dan
4. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan mendukung Misi ke-7 yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

d. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, salah satunya adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis. Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme

kokreasi antaraktor dapat dioptimalkan. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya langkah transformatif dalam mewujudkan *collaborative governance*, juga pada proses untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan lima tahun ke depan.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain:

1. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender;
3. Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah;
4. Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim;
5. Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
6. Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan
7. Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah terkait Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Tabel 2. 8
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

g. Isu Strategis RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Penyelenggaraan *good governance* merupakan sebuah solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, transparansi, dan mengedepankan akuntabilitas. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Kota Semarang dalam mencapai hal tersebut, antara lain terkait pengelolaan keuangan, pelayanan publik, manajemen kota, dan strategi kepemimpinan.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, upaya realisasi komponen-komponen PAD harus terus dioptimalkan untuk menghindari defisit pada pos-pos yang ada. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dari masyarakat yang belum mencapai 100%, baik dalam pembayaran maupun mendaftarkan tempat usahanya. Mengingat pajak merupakan instrumen penting bagi pembiayaan daerah, maka pemerintah harus terus menggenjot lewat berbagai macam inovasi agar wajib pajak mampu dan mau membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang. Di sisi lain, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masih mendapat sorotan dimana tingkat kriminalitas kota masih tinggi karena cakupan patroli, rasio petugas linmas, sarana prasarana pengamanan masih belum memenuhi standar minimal dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Poin terakhir yaitu strategi kepemimpinan masih perlu dioptimalkan, khususnya terkait peningkatan jumlah kerjasama antar daerah seperti yang diamanatkan dalam Perpres No. 78 Tahun 2018 dan Perpres No. 79 Tahun 2019. Hal ini penting agar peran Kota Semarang sebagai perkotaan inti dapat maksimal serta terciptanya keterpaduan dalam suatu regional Kedungsepur. Masih adanya ketidakkonsistenan dalam penerjemahan dokumen rencana jangka menengah ke dalam rencana tahunan juga menyebabkan kinerja pembangunan di Kota Semarang ikut terpengaruhi.

2.2.3. Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan isu global, RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Isu Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Pemerintah Digital terus meningkat	Belum optimalnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Adapun tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab”.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat;
2. Meningkatnya layanan statistik berbasis teknologi informasi yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Meningkatnya keamanan data dan informasi; dan
4. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.	Meningkatnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab		Indeks Pemerintah Digital	Angka	4.00	4,04	4,07	4,09	4,11	4,13	
		Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95	95,5	96	96,5	97	97,5	
		Meningkatnya layanan statistik berbasis teknologi informasi yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	3,04	3,10	3,30	3,50	3,70	3,90	
		Meningkatnya keamanan data dan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Angka	608	608	608	608	608	608	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Angka	80,01	80,16	80,17	80,18	80,19	80,20	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Angka	75	77	80	82	85	87	

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Tahapan Strategi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan Optimalisasi pelayanan masyarakat terkait komunikasi dan informasi publik	Peningkatan Optimalisasi pelayanan masyarakat terkait komunikasi dan informasi publik	Penguatan Optimalisasi pelayanan masyarakat terkait komunikasi dan informasi publik	Percepatan Optimalisasi pelayanan masyarakat terkait komunikasi dan informasi publik	Perwujudan Optimalisasi pelayanan masyarakat terkait komunikasi dan informasi publik
Pengembangan Optimalisasi kualitas pengelolaan layanan informasi dan saluran komunikasi publik	Peningkatan Optimalisasi kualitas pengelolaan layanan informasi dan saluran komunikasi publik	Penguatan Optimalisasi kualitas pengelolaan layanan informasi dan saluran komunikasi publik	Percepatan Optimalisasi kualitas pengelolaan layanan informasi dan saluran komunikasi publik	Perwujudan Optimalisasi kualitas pengelolaan layanan informasi dan saluran komunikasi publik
Pengembangan Optimalisasi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang memadai	Peningkatan Optimalisasi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang memadai	Penguatan Optimalisasi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang memadai	Percepatan Optimalisasi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang memadai	Perwujudan Optimalisasi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang memadai
Pengembangan Optimalisasi layanan pengelolaan e-government dan integrasi aplikasi	Peningkatan Optimalisasi layanan pengelolaan e-government dan integrasi aplikasi	Penguatan Optimalisasi layanan pengelolaan e-government dan integrasi aplikasi	Percepatan Optimalisasi layanan pengelolaan e-government dan integrasi aplikasi	Perwujudan Optimalisasi layanan pengelolaan e-government dan integrasi aplikasi
Pengembangan Optimalisasi kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data statistik	Peningkatan Optimalisasi kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data statistik	Penguatan Optimalisasi kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data statistik	Percepatan Optimalisasi kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data statistik	Perwujudan Optimalisasi kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data statistik
Pengembangan Optimalisasi perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Peningkatan Optimalisasi perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Penguatan Optimalisasi perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Percepatan Optimalisasi perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Perwujudan Optimalisasi perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi
Pengembangan Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peningkatan Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Penguatan Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Percepatan Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Perwujudan Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan.	• Meningkatkan kualitas strategi dan efektivitas komunikasi publik • Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis di bidang komunikasi dan teknologi informatika • Meningkatkan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi • Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dalam penyampaian informasi kepada masyarakat • Meningkatkan kualitas pengelolaan aspirasi masyarakat dan penyampaian informasi • Meningkatkan pengelolaan media komunikasi publik dalam mendukung penyebaran informasi • Meningkatkan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pemerintahan digital • Meningkatkan pemenuhan infrastruktur TIK dalam menunjang pelayanan publik dan pemerintahan • Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur internet dan intranet di lingkungan pemerintahan • Meningkatkan kualitas dan integrasi aplikasi layanan publik	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			• Meningkatkan integrasi layanan manajemen data pemerintahan • Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang sesuai dengan kaidah Sistem Statistik Nasional • Meningkatkan pemanfaatan dan diseminasi data statistik sektoral • Meningkatkan mutu tata kelola data statistik sektoral • Meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi • Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian • Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian • Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	Meningkatnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab				Indeks Pemerintah Digital		Kepala Dinas
		Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat			Indeks Keterbukaan Informasi Publik		Kepala Dinas
			Meningkatnya peran komunitas teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi		Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik
				Meningkatnya kualitas strategi dan efektivitas komunikasi publik	Persentase rekomendasi menara telekomunikasi yang ditindaklanjuti	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Penyusunan Strategi dan Pengawasan Komunikasi Publik
				Terlaksananya sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan strategis di bidang komunikasi	Persentase peningkatan jumlah kolaborasi desiminasi informasi dengan komunitas TIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				dan teknologi informatika			Komunikasi dan Teknologi Informatika
				Terlaksananya diseminasi informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	
				Meningkatnya kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas di bidang TIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengembangan SDM dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
				Meningkatnya pelayanan informasi publik yang berkualitas	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik
				Tersedianya pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aspirasi masyarakat dan penyampaian informasi	Persentase pengaduan dan layanan darurat yang tertangani	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Informasi
				Terlaksananya monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Terwujudnya pengelolaan media komunikasi publik dalam mendukung penyebaran informasi	Persentase capaian konten media yang dipublikasikan	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengelolaan Media
				Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi		Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur
				Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pemerintahan digital	Persentase layanan publik yang didukung dengan infrastruktur TIK yang memadai	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan	Persentase pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Informasi
				Terlaksananya penyelenggaran sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur internet dan intranet di lingkungan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pelayanan Infrastruktur Internet dan Intranet
				Terlaksananya penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan e-government		Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas dan integrasi aplikasi layanan publik	Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi dalam satu portal layanan terpadu	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
				Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Meningkatnya integrasi layanan manajemen data pemerintahan	Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan interoperabilitas data antar sistem internal dan eksternal	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Layanan Manajemen Data
				Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Meningkatnya layanan statistik berbasis teknologi informasi yang akurat dan dapat diandalkan			Indeks Pembangunan Statistik		Kepala Dinas

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kepala Bidang Statistik
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang memenuhi standar data statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatkan Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data	Persentase Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan
				Tersedianya statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Terlaksananya proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
				Meningkatkan pemanfaatan dan diseminasi data statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang disebarluaskan	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2.20.02.2.01.0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui forum satu data daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Meningkatkan Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data	Persentase Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha
				Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
		Meningkatnya keamanan data dan informasi			Indeks Keamanan Informasi		Kepala Dinas
			Meningkatnya perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi		Persentase keamanan informasi sesuai sistem manajemen keamanan informasi	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk	Persentase penanganan kejadian risiko keamanan informasi	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk	Kepala Seksi Keamanan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				pengamanan data dan informasi		Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi dan Persandian
				Terlaksananya keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian		Kepala Dinas
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian		Kepala Dinas
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Diskominfo
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian beserta pelaporan kinerja yang sesuai	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	X.XX.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				peraturan perundangan			
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	X.XX.01.2.01.0008 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Diskominfo
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Diskominfo
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya pendataan dan pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				administrasi kepegawaian			
				Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				berbasis elektronik pada SKPD			
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selesai ditindaklanjuti	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi,	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi,	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Informatika, Statistik dan Persandian	Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan		
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu :

1. Pengambilan data di tingkat organisasi pemerintahan terkecil;
2. Optimalisasi pemanfaatan CCTV;
3. Integrasi sistem data;
4. Pengembangan infrastruktur digital (smart connectivity) sebagai bagian kota cerdas;
5. Pengambilan keputusan berdasarkan big data;
6. Pengembangan kota cerdas untuk pengelolaan kota berbasis data.

Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Pengambilan data di tingkat organisasi pemerintahan terkecil	Optimalnya data sektoral kewilayahan	**Kegiatan :** Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. **Sub Kegiatan :** 1.Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional;	
2.	Optimalisasi Pemanfaatan CCTV	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan efektivitas pengawasan publik melalui pemanfaatan CCTV	**Kegiatan :** Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** 1.Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 2.Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
3.	Integrasi sistem data	Terwujudnya interoperabilitas data antar perangkat daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat	**Kegiatan:** Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan:** 1.Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, 2.Penyelenggaraan Sistem pusat kendali Pemerintah Daerah 3.Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota **Kegiatan :** Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** 1.Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
4.	Pengembangan infrastruktur digital (*smart connectivity*) sebagai bagian kota cerdas	Tersedianya konektivitas digital yang andal, merata, dan mendukung pelayanan publik berbasis smart city	**Kegiatan :** Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, **Sub Kegiatan :** 1.Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 2.Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 3.Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
5.	Pengambilan keputusan berdasarkan big data	Meningkatnya kualitas kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis analisis big data	**Kegiatan :** Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. **Sub Kegiatan :** 1.Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional; 2.Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral. **Kegiatan:** Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan:** 1.Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
6.	Pengembangan kota cerdas untuk pengelolaan kota berbasis data	Terwujudnya tata kelola kota cerdas yang adaptif, responsif, dan inovatif berbasis data terpadu	**Kegiatan:** Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan:** 1.Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah 2.Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas 3.Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah **Kegiatan :** Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** 1.Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Penerapan konsep Smart Governance, Smart Living, Smart Environment, Smart Economy, Smart Mobility, dan Smart People,Pengembangan Command Center sebagai pusat kendali layanan publik, Pemanfaatan teknologi IoT dan AI untuk pengelolaan kota (transportasi, lingkungan, pelayanan publik)

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ OUTPUT / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				71.289.704.909		78.986.941.630		82.337.137.333		82.952.520.679		84.404.082.548	
2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik				5.499.851.716		6.081.711.966		6.334.964.630		6.381.483.546		6.491.212.035	
(1) Meningkatnya peran komunitas teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi	Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi	10 Persentase	40 Persentase	893.393.000	60 Persentase	1.297.832.900	80 Persentase	1.445.027.732	90 Persentase	1.466.787.289	100 Persentase	1.531.580.666	Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.499.851.716		6.081.711.966		6.334.964.630		6.381.483.546		6.491.212.035	
(1) Meningkatnya kualitas strategi dan efektivitas komunikasi publik	Persentase rekomendasi menara telekomunikasi yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	201.728.000	100 Persentase	341.167.900	100 Persentase	358.362.732	100 Persentase	360.122.289	100 Persentase	374.915.666	Sub Koordinator Penyusunan Strategi dan Pengawasan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				201.728.000		341.167.900		358.362.732		360.122.289		374.915.666	
Terlaksananya sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0 Persentase	100 Persentase	201.728.000	100 Persentase	341.167.900	100 Persentase	358.362.732	100 Persentase	360.122.289	100 Persentase	374.915.666	
(2) Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan strategis di bidang komunikasi dan teknologi informatika	Persentase peningkatan jumlah kolaborasi desiminasi informasi dengan komunitas TIK	100 Persentase	100 Persentase	339.937.000	100 Persentase	456.937.000	100 Persentase	536.937.000	100 Persentase	546.937.000	100 Persentase	566.937.000	Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan Komunikasi dan Teknologi Informatika
2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi				339.937.000		456.937.000		536.937.000		546.937.000		566.937.000	
Terlaksananya diseminasi informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0 Persentase	100 Persentase	339.937.000	100 Persentase	456.937.000	100 Persentase	536.937.000	100 Persentase	546.937.000	100 Persentase	566.937.000	
(3) Meningkatnya kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas di bidang TIK	100 Persentase	100 Persentase	351.728.000	100 Persentase	499.728.000	100 Persentase	549.728.000	100 Persentase	559.728.000	100 Persentase	589.728.000	Sub Koordinator Pengembangan SDM dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				351.728.000		499.728.000		549.728.000		559.728.000		589.728.000	
Meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	0 Orang	90 Orang	351.728.000	95 Orang	499.728.000	95 Orang	549.728.000	100 Orang	559.728.000	100 Orang	589.728.000	
(2) Meningkatnya penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	87,48	88.01	4.606.458.716	89.5	4.783.879.066	89.75	4.889.936.898	90.01	4.914.696.257	90.25	4.959.631.369	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
(1) Meningkatnya pelayanan informasi publik yang berkualitas	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	100 Persentase	100 Persentase	954.417.276	100 Persentase	977.869.960	100 Persentase	997.869.960	100 Persentase	998.869.960	100 Persentase	999.869.960	Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik				954.417.276		977.869.960		997.869.960		998.869.960		999.869.960	
Tersedianya pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0 Permohonan	5600 Permohonan	954.417.276	5400 Permohonan	977.869.960	5200 Permohonan	997.869.960	5000 Permohonan	998.869.960	4800 Permohonan	999.869.960	
(2) Meningkatnya kualitas pengelolaan aspirasi masyarakat dan penyampaian informasi	Persentase pengaduan dan layanan darurat yang tertangani	100 Persentase	100 Persentase	1.171.192.680	100 Persentase	1.267.192.680	100 Persentase	1.287.192.680	100 Persentase	1.297.192.680	100 Persentase	1.327.192.680	Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Informasi
2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				1.171.192.680		1.267.192.680		1.287.192.680		1.297.192.680		1.327.192.680	
Terlaksananya monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0 rekomendasi	5500 rekomendasi	1.171.192.680	6000 rekomendasi	1.267.192.680	6200 rekomendasi	1.287.192.680	6300 Rekomendasi	1.297.192.680	6500 rekomendasi	1.327.192.680	
(3) Terwujudnya pengelolaan media komunikasi publik dalam mendukung penyebaran informasi	Persentase capaian konten media yang dipublikasikan	100 Persentase	100 Persentase	2.480.848.760	100 Persentase	2.538.816.426	100 Persentase	2.604.874.258	100 Persentase	2.618.633.617	100 Persentase	2.632.568.729	Sub Koordinator Pengelolaan Media
2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2.480.848.760		2.538.816.426		2.604.874.258		2.618.633.617		2.632.568.729	
Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media	5 Media	5 Media	2.480.848.760	5 Media	2.538.816.426	5 Media	2.604.874.258	5 Media	2.618.633.617	5 Media	2.632.568.729	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	berbayar sesuai kriteria/juknis												
2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				45.225.064.681		50.009.678.665		52.092.165.380		52.474.688.598		53.376.981.650	
(1) Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi	100 Persentase	100 Persentase	40.209.129.521	100 Persentase	43.493.743.505	100 Persentase	45.276.230.220	100 Persentase	45.458.753.438	100 Persentase	45.961.046.490	Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				45.225.064.681		50.009.678.665		52.092.165.380		52.474.688.598		53.376.981.650	
(1) Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pemerintahan digital	Persentase layanan publik yang didukung dengan infrastruktur TIK yang memadai	100 Persentase	100 Persentase	5.578.855.057	100 Persentase	6.578.855.057	100 Persentase	7.856.103.994	100 Persentase	7.878.855.057	100 Persentase	7.978.855.057	Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				5.578.855.057		6.578.855.057		7.856.103.994		7.878.855.057		7.978.855.057	
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	0 Laporan	1 Laporan	5.578.855.057	1 Laporan	6.578.855.057	1 Laporan	7.856.103.994	1 Laporan	7.878.855.057	1 Laporan	7.978.855.057	
(2) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur internet dan intranet di lingkungan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persentase	100 Persentase	25.164.683.814	100 Persentase	26.949.297.798	100 Persentase	27.254.535.576	100 Persentase	27.314.307.731	100 Persentase	27.216.600.783	Sub Koordinator Pelayanan Infrastruktur Internet dan Intranet
2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				25.164.683.814		26.949.297.798		27.254.535.576		27.314.307.731		27.216.600.783	
Terlaksananya penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	25.164.683.814	52 Perangkat Daerah	26.949.297.798	52 Perangkat Daerah	27.254.535.576	52 Perangkat Daerah	27.314.307.731	52 Perangkat Daerah	27.216.600.783	
(3) Meningkatnya pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan	Persentase pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 Persentase	100 Persentase	9.465.590.650	100 Persentase	9.965.590.650	100 Persentase	10.165.590.650	100 Persentase	10.265.590.650	100 Persentase	10.765.590.650	Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Informasi
2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan				9.465.590.650		9.965.590.650		10.165.590.650		10.265.590.650		10.765.590.650	
Terlaksananya penyelenggaran sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 Aplikasi	517 Aplikasi	9.465.590.650	517 Aplikasi	9.965.590.650	517 Aplikasi	10.165.590.650	517 Aplikasi	10.265.590.650	517 Aplikasi	10.765.590.650	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(2) Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan e-government	Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)	100 Persentase	100 Persentase	5.015.935.160	100 Persentase	6.515.935.160	100 Persentase	6.815.935.160	100 Persentase	7.015.935.160	100 Persentase	7.415.935.160	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(1) Meningkatnya kualitas dan integrasi aplikasi layanan publik	Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi dalam satu portal layanan terpadu	100 Persentase	100 Persentase	3.600.331.280	100 Persentase	4.600.331.280	100 Persentase	4.700.331.280	100 Persentase	4.800.331.280	100 Persentase	5.000.331.280	Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				3.600.331.280		4.600.331.280		4.700.331.280		4.800.331.280		5.000.331.280	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	0 Aplikasi	517 Aplikasi	3.600.331.280	517 Aplikasi	4.600.331.280	517 Aplikasi	4.700.331.280	517 Aplikasi	4.800.331.280	517 Aplikasi	5.000.331.280	
(2) Meningkatnya integrasi layanan manajemen data pemerintahan	Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan interoperabilitas data antar sistem internal dan eksternal	100 Persentase	100 Persentase	1.415.603.880	100 Persentase	1.915.603.880	100 Persentase	2.115.603.880	100 Persentase	2.215.603.880	100 Persentase	2.415.603.880	Sub Koordinator Layanan Manajemen Data
2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				1.415.603.880		1.915.603.880		2.115.603.880		2.215.603.880		2.415.603.880	
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	0 Dokumen	12 Dokumen	1.415.603.880	12 Dokumen	1.915.603.880	12 Dokumen	2.115.603.880	12 Dokumen	2.215.603.880	12 Dokumen	2.415.603.880	
X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				20.564.788.512		22.895.550.999		23.910.007.323		24.096.348.535		24.535.888.863	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(1) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas	100 Persentase	100 Persentase	18.498.324.934	100 Persentase	19.405.923.681	100 Persentase	20.358.402.365	100 Persentase	21.358.004.983	100 Persentase	22.387.087.732	Sekretaris Diskominfo
X.XX.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			102.200.000		102.200.000		102.200.000		102.200.000		102.200.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	100 Persentase	100 Persentase	102.200.000	100 Persentase	102.200.000	100 Persentase	102.200.000	100 Persentase	102.200.000	100 Persentase	102.200.000	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
X.XX.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	
X.XX.01.2.01.0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000	
Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	
X.XX.01.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000	
Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	
X.XX.01.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000	
Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	
X.XX.01.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000	
Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	
X.XX.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	
X.XX.01.2.01.0008 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.396.124.934		19.303.723.681		20.256.202.365		21.255.804.983		22.284.887.732	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	100 Persentase	100 Persentase	18.396.124.934	100 Persentase	19.303.723.681	100 Persentase	20.256.202.365	100 Persentase	21.255.804.983	100 Persentase	22.284.887.732	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.951.974.934		18.849.573.681		19.792.052.365		20.781.654.983		21.820.737.732	
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	138 Orang/Bulan	17.951.974.934	137 Orang/Bulan	18.849.573.681	137 Orang/Bulan	19.792.052.365	137 Orang/Bulan	20.781.654.983	137 Orang/Bulan	21.820.737.732	
X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				420.000.000		430.000.000		440.000.000		450.000.000		440.000.000	
Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000	1 Dokumen	430.000.000	1 Dokumen	440.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	440.000.000	
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000	
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.050.000	1 Laporan	8.050.000	1 Laporan	8.050.000	1 Laporan	8.050.000	1 Laporan	8.050.000	
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000	
Tersedianya laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	14 Laporan	12 Laporan	8.050.000	12 Laporan	8.050.000	12 Laporan	8.050.000	12 laporan	8.050.000	12 Laporan	8.050.000	
X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000	
Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
prognosis realisasi anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran												
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(2) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		100 Persentase	2.066.463.578	100 Persentase	3.489.627.318	100 Persentase	3.551.604.958	100 Persentase	2.738.343.552	100 Persentase	2.148.801.131	Sekretaris Diskominfo
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000		265.000.000		240.000.000		245.000.000		120.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 Persentase	100 Persentase	150.000.000	100 Persentase	265.000.000	100 Persentase	240.000.000	100 Persentase	245.000.000	100 Persentase	120.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		20.000.000	
Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				140.000.000		250.000.000		220.000.000		220.000.000		100.000.000	
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	150 Orang	140.000.000	150 Orang	250.000.000	150 Orang	220.000.000	150 Orang	220.000.000	150 Orang	100.000.000	
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				371.463.578		1.099.627.318		900.000.000		565.343.552		280.000.000	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 Persentase	100 Persentase	371.463.578	100 Persentase	1.099.627.318	100 Persentase	900.000.000	100 Persentase	565.343.552	100 Persentase	280.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				74.463.578		159.627.318		125.000.000		130.000.000		40.000.000	
Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	74.463.578	3 Paket	159.627.318	3 Paket	125.000.000	3 Paket	130.000.000	3 Paket	40.000.000	
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Penggandaan yang Disediakan												
X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		40.000.000	
Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	25 Laporan	50.000.000	25 Laporan	60.000.000	25 Laporan	70.000.000	25 Laporan	80.000.000	25 Laporan	40.000.000	
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		250.000.000		170.000.000		170.000.000		100.000.000	
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	150 Laporan	150.000.000	150 Laporan	250.000.000	150 Laporan	170.000.000	150 Laporan	170.000.000	150 Laporan	100.000.000	
X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				75.000.000		600.000.000		500.000.000		145.343.552		60.000.000	
Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	600.000.000	3 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	145.343.552	3 Dokumen	60.000.000	
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.000.000		170.000.000		180.000.000		100.000.000		50.000.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 Persentase	100 Persentase	75.000.000	100 Persentase	170.000.000	100 Persentase	180.000.000	100 Persentase	100.000.000	100 Persentase	50.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		170.000.000		180.000.000		100.000.000		50.000.000	
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	75.000.000	4 Unit	170.000.000	4 Unit	180.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	50.000.000	
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				840.000.000		900.000.000		930.000.000		970.000.000		951.000.000	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selesai ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	840.000.000	100 Persentase	900.000.000	100 Persentase	930.000.000	100 Persentase	970.000.000	100 Persentase	951.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				645.000.000		700.000.000		720.000.000		750.000.000		740.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24 Laporan	645.000.000	24 Laporan	700.000.000	24 Laporan	720.000.000	24 Laporan	750.000.000	24 Laporan	740.000.000	
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				195.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		211.000.000	
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	4 Laporan	195.000.000	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	210.000.000	4 Laporan	220.000.000	4 Laporan	211.000.000	
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				630.000.000		1.055.000.000		1.301.604.958		858.000.000		747.801.131	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	630.000.000	100 Persentase	1.055.000.000	100 Persentase	1.301.604.958	100 Persentase	858.000.000	100 Persentase	747.801.131	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		55.000.000		57.000.000		58.000.000		60.000.000	
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	57.000.000	1 Unit	58.000.000	1 Unit	60.000.000	
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				430.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	22 Unit	430.000.000	22 Unit	550.000.000	22 Unit	600.000.000	22 Unit	600.000.000	22 Unit	600.000.000	
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		200.000.000		200.000.000		100.000.000		37.801.131	
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6 Unit	75.000.000	6 Unit	200.000.000	6 Unit	200.000.000	6 Unit	100.000.000	6 Unit	37.801.131	
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		250.000.000		444.604.958		100.000.000		50.000.000	
Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 Unit	2 Unit	75.000.000	2 Unit	250.000.000	2 Unit	444.604.958	2 Unit	100.000.000	2 Unit	50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
gedung kantor dan bangunan lainnya	yang Dipelihara / Direhabilitasi												
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				839.803.332		928.650.851		967.321.426		974.424.662		991.179.722	
2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				839.803.332		928.650.851		967.321.426		974.424.662		991.179.722	
Meningkatnya kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik	100 Persen	100 Persentase	839.803.332	100 Persentase	928.650.851	100 Persentase	967.321.426	100 Persentase	974.424.662	100 Persentase	991.179.722	Kepala Bidang Statistik
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				839.803.332		928.650.851		967.321.426		974.424.662		991.179.722	
(1) Meningkatnya Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data	Persentase Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data	100 Persentase	100 Persentase	289.420.000	100 Persentase	309.420.000	100 Persentase	309.420.000	100 Persentase	314.420.000	100 Persentase	326.175.060	Sub Koordinator Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan
2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				135.000.000		145.000.000		145.000.000		150.000.000		157.755.060	
Tersedianya statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	0 %	100 %	135.000.000	100 %	145.000.000	100 %	145.000.000	100 %	150.000.000	100 %	157.755.060	
2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				156.450.000		166.450.000		176.450.000		176.450.000		178.450.000	
Terlaksananya proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	0 %	100 %	156.450.000	100 %	166.450.000	100 %	176.450.000	100 %	176.450.000	100 %	178.450.000	
(2) Meningkatnya pemanfaatan dan diseminasi data statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang disebarluaskan	100 Persentase	100 Persentase	268.933.332	100 Persentase	297.780.851	100 Persentase	316.451.426	100 Persentase	318.554.662	100 Persentase	320.554.662	Sub Koordinator Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan
2.20.02.2.01.0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				155.560.000		165.560.000		165.560.000		165.560.000		167.560.000	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0 Orang	34 Orang	155.560.000	34 Orang	165.560.000	34 Orang	165.560.000	34 Orang	165.560.000	34 Orang	167.560.000	
2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				113.373.332		132.220.851		150.891.426		152.994.662		152.994.662	
Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	0 %	2 Laporan	113.373.332	2 Laporan	132.220.851	2 Laporan	150.891.426	2 Laporan	152.994.662	2 Laporan	152.994.662	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ OUTPUT SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
melalui forum satu data daerah													
(3) Meningkatnya Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data	Persentase Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data	100 Persentase	100 Persentase	281.450.000	100 Persentase	321.450.000	100 Persentase	341.450.000	100 Persentase	341.450.000	100 Persentase	344.450.000	Sub Koordinator Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha
2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				125.000.000		155.000.000		165.000.000		165.000.000		166.000.000	
Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	0 %	100 %	125.000.000	100 %	155.000.000	100 %	165.000.000	100 %	165.000.000	100 %	166.000.000	
2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				154.420.000		164.420.000		164.420.000		164.420.000		168.420.000	
Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	0 %	100 %	154.420.000	100 %	164.420.000	100 %	164.420.000	100 %	164.420.000	100 %	168.420.000	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.052.918.031		1.164.312.152		1.212.796.059		1.221.701.864		1.242.708.813	
2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				1.052.918.031		1.164.312.152		1.212.796.059		1.221.701.864		1.242.708.813	
Meningkatnya perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Persentase keamanan informasi sesuai sistem manajemen keamanan informasi	100 Persentase	100 Persentase	1.052.918.031	100 Persentase	1.164.312.152	100 Persentase	1.212.796.059	100 Persentase	1.221.701.864	100 Persentase	1.242.708.813	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.052.918.031		1.164.312.152		1.212.796.059		1.221.701.864		1.242.708.813	
Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi	Persentase penanganan kejadian risiko keamanan informasi	75 Persentase	80 Persentase	1.164.312.152	85 Persentase	1.164.312.152	90 Persentase	1.212.796.059	95 Persentase	1.221.701.864	100 Persentase	1.242.708.813	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1.052.918.031		1.164.312.152		1.212.796.059		1.221.701.864		1.242.708.813	
Terlaksananya keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39 Laporan	12 Laporan	1.052.918.031	12 Laporan	1.164.312.152	12 Laporan	1.212.796.059	12 Laporan	1.221.701.864	12 Laporan	1.242.708.813	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	4.00	4.04	4.07	4.09	4.11	4.13	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95	95.5	96	96.5	97	97.5	
3	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	3.04	3.10	3.30	3.50	3.70	3.90	
4	Indeks Keamanan Informasi	Angka	608	608	608	608	608	608	

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasI	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	95,64	96,28	96,92	97,56	98,2	98,84	
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	100	100	100	100	100	100	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN								
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Angka	87	87.2	87.42	87.67	87.94	88.23	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Permasalahan “Belum optimalnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab” sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

19. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025 - 2029, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
35. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang; dan
36. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun

1.4 Sistematika Penyusunan

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 5 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
b. pelaksanaan koordinasi bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
c. pelaksanaan kebijakan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
e. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi;
d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
f. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

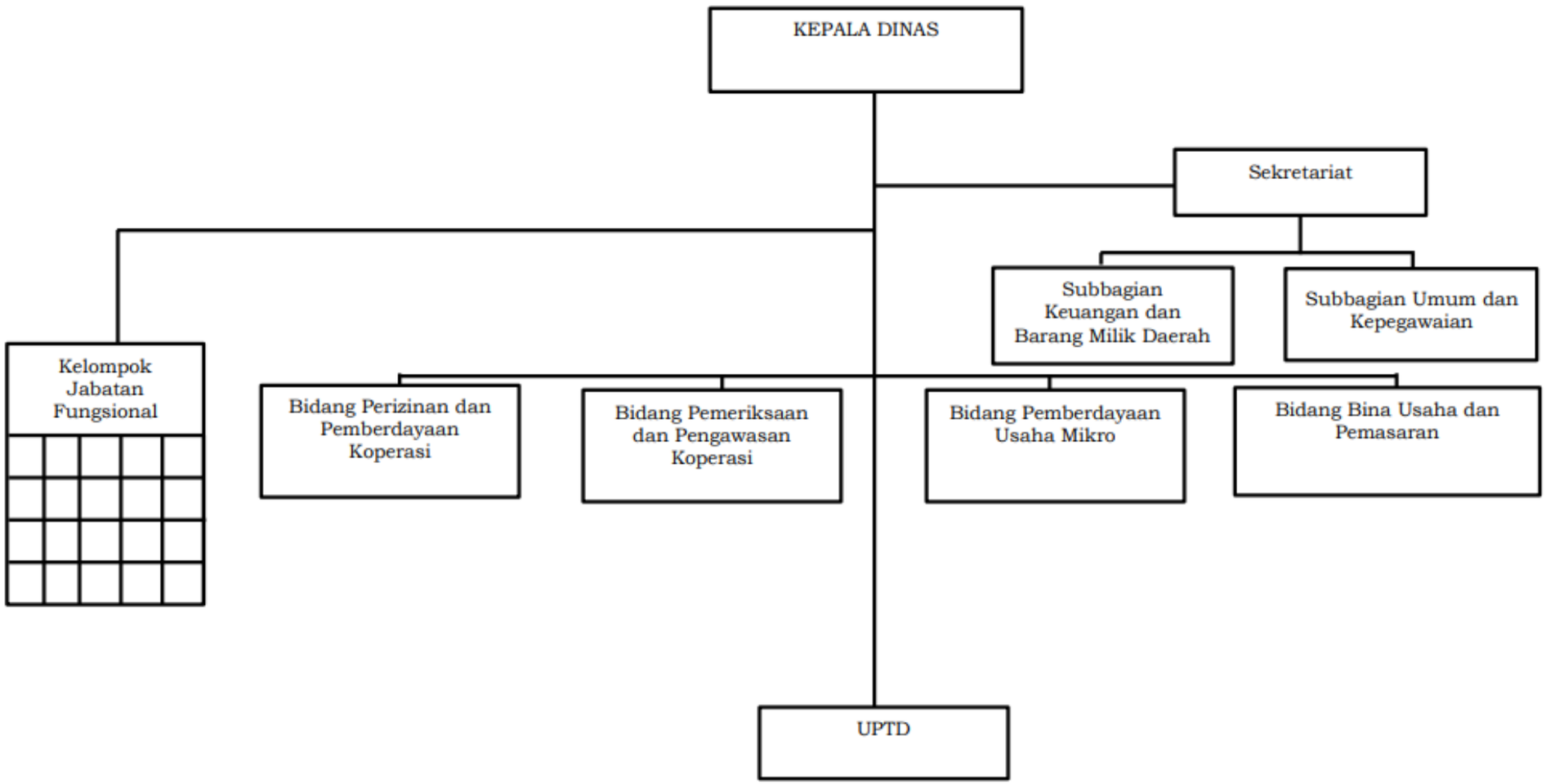

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

II. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Adapun uraian tugas Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang meliputi :
   a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
   d) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas bidang bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang bina usaha dan pemasaran dan UPTD;
   e) pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait;
   f) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Dinas;
   g) pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan, pengelolaan proses bisnis dan standar operasional prosedur, serta sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko Dinas;
   h) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
   i) pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
   j) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas;
   k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
   l) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;

m) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
n) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
o) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
p) pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan manajemen perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
q) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
r) pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
s) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
t) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
u) pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
v) pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
w) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
x) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
y) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
z) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat mempunyai fungsi :
a) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
e) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
g) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat, terdiri atas :
   1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

   Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

   1) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :
      a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
      b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
      c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
      d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban teknis keuangan di lingkungan Dinas;
      e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;
      f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan di lingkungan Dinas;
      g. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
      h. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
      i. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
      j. menyiapkan kegiatan pengelolaan menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
      k. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
      l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

   2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
      a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
      c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
      d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahan di lingkungan Dinas;
      e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
      f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
      g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
      h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi

Bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi. Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

a. Kepala Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas :

a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi;
e) pelaksanaan kegiatan perizinan, kelembagaan, fasilitasi usaha, monitoring, evaluasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
f) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
g) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas; pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi perizinan Koperasi;
h) pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi pada kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas;
i) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi perkoperasian kepada kelompok masyarakat;
j) pelaksanaan penyusunan dokumen akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi primer kota;
k) pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen pembubaran koperasi;
l) pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan koperasi;
m) pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan pemberdayaan koperasi;
n) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi;
o) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bagi anggota koperasi;
p) pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi;
q) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi;

r) pelaksanaan kegiatan pengembangan perluasan akses pembiayaan atau permodalan;
s) pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan;
t) pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam rangka perlindungan koperasi;
u) pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan informasi koperasi;
v) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi;
w) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi;
x) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
y) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
a) penyiapan perumusan kebijakan tentang perizinan, kelembagaan, fasilitasi pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM koperasi, penguatan dan perlindungan koperasi;
b) pelaksanaan koordinasi tentang perizinan, kelembagaan, fasilitasi pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM koperasi, penguatan dan perlindungan koperasi;
c) pelaksanaan kebijakan tentang perizinan, kelembagaan, fasilitasi pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM koperasi, penguatan dan perlindungan koperasi;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan dan pemberdayaan koperasi; dan
e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

a. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas :
a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
c) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
d) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
e) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
f) pelaksanaan kegiatan inventarisasi bahan pengawasan koperasi;
g) pelaksanaan kegiatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan;
h) pelaksanaan kegiatan penerapan sanksi bagi koperasi;
i) pelaksanaan kegiatan perencanaan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
j) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;

k) pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
l) pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisa data;
m) rencana penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
n) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
o) pelaksanaan kegiatan penyusunan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
p) pelaksanaan kegiatan penilaian koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi dan pengawasan koperasi;
q) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
r) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
s) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
t) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi:
a) penyiapan perumusan kebijakan tentang pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP/KSPPS/USP/USPPS) yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kota;
b) pelaksanaan koordinasi tentang pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP/KSPPS/USP/USPPS) yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kota;
c) pelaksanaan kebijakan tentang pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP/KSPPS/USP/USPPS) yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kota;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pengawasan dan pemeriksaan; dan
e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang pemberdayaan usaha mikro berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas :
a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan usaha mikro;
e) pelaksanaan kegiatan akses pembiayaan atau permodalan bagi usaha mikro;

f) pelaksanaan kegiatan penguatan,perlindungan dan standarisasi produk usaha mikro;
g) koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan/ stakeholder dalam pemberdayaan usaha mikro;
h) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
i) peningkatan pemahaman, pengetahuan, kapasitas dan kompetensi sdm usaha mikro dan kewirausahaan bagi melalui pendidikan dan pelatihan;
j) pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang pemberdayaan usaha mikro;
l) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang pemberdayaan usaha mikro;
m) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
a) penyiapan perumusan kebijakan tentang pemulihan usaha, sertifikasi dan standarisasi produk, peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro, kewirausahaan, serta pemberdayaan kelembagaan potensi usaha;
b) pelaksanaan koordinasi tentang pemulihan usaha, sertifikasi dan standarisasi produk, peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro, kewirausahaan, serta pemberdayaan kelembagaan potensi usaha;
c) pelaksanaan kebijakan tentang pemulihan usaha, sertifikasi dan standarisasi produk, peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro, kewirausahaan, serta pemberdayaan kelembagaan potensi usaha;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran

Bidang bina usaha dan pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang bina usaha dan pemasaran tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang usaha dan pemasaran. Bidang bina usaha dan pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas :
a) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan pengembangan usaha mikro;
e) pelaksanaan kegiatan pengembangan melalui kemitraan usaha mikro;

f) koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan / stakeholder dalam pengembangan dan pemasaran usaha mikro;
g) pelaksanaan kegiatan pengembangan akses pasar bagi produk usaha mikro;
h) pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi;
i) pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bina usaha dan pemasaran;
j) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang bina usaha dan pemasaran;
k) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang bina usaha dan pemasaran;
l) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
a) penyiapan perumusan kebijakan tentang pengembangan usaha mikro melalui kemitraan usaha, perluasan akses pasar serta desain dan teknologi;
b) pelaksanaan koordinasi tentang pengembangan usaha mikro melalui kemitraan usaha, perluasan akses pasar serta desain dan teknologi;
c) pelaksanaan kebijakan tentang pengembangan usaha mikro melalui kemitraan usaha, perluasan akses pasar serta desain dan teknologi;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan usaha mikro; dan
e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

VII. UPTD

UPTD PLUT KUMKM merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. UPTD PLUT KUMKM dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Adapun susunan organisasi dan Tupoksi UPTD PLUT KUMKM berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Susunan Organisasi
Susunan Organisasi UPTD PLUT KUMKM, terdiri atas :
a) Kepala UPTD;
b) Subbagian Tata Usaha; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kasubbag TU yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

2) Struktur Organisasi

Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPTD PLUT KUMKM

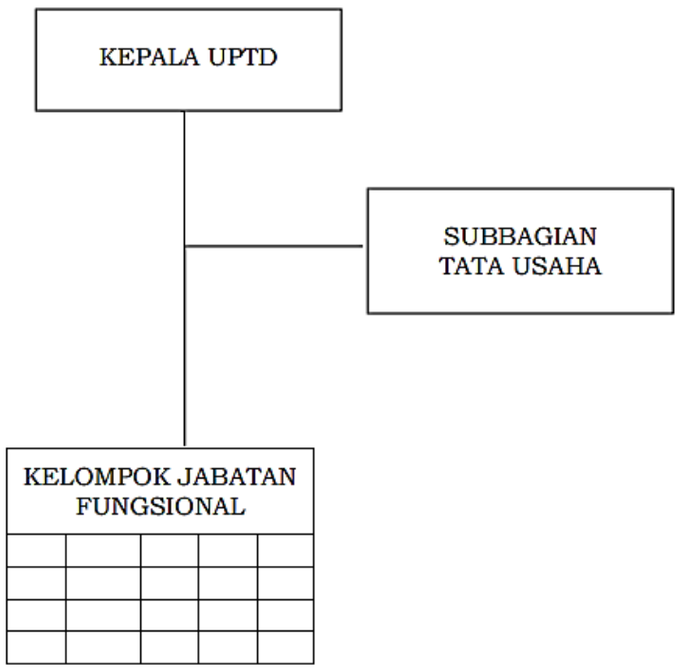

3) Tugas UPTD PLUT KUMKM
UPTD PLUT KUMKM mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi layanan konsultasi, pendampingan dan inkubasi bisnis untuk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

4) Fungsi UPTD PLUT KUMKM
UPTD PLUT KUMKM dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a) penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
   b) penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD PLUT KUMKM;
   c) pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD PLUT KUMKM;
   d) pelaksanaan pengelolaan dan operasional UPTD PLUT KUMKM;
   e) pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
      i. konsultasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
      ii. pendampingan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
      iii. inkubasi bisnis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
   f) pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan tugas konsultan/pendamping UPTD PLUT KUMKM;
   g) pelaksanaan pelaporan hasil pendampingan yang dilakukan secara berkala;
   h) pelaksanaan ketatausahaan UPTD PLUT KUMKM;
   i) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD PLUT KUMKM; dan

j) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Uraian Tugas dan Jabatan pada UPTD PLUT KUMKM

a) Kepala UPTD
Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

b) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi:
- menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- menyiapkan pengelolaan keuangan;
- menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PLUT KUMKM menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang per 31 Agustus 2025, Jumlah Pegawai sebanyak 79 orang, yang terdiri dari :

- PNS : 54 orang (17 Laki-laki, 37 Perempuan)
- PPPK : 20 orang (6 Laki-laki, 14 Perempuan)
- Non ASN (PJLP) : 5 orang (5 Perempuan).

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Semarang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 72 orang (91%). Sisanya lulusan SMA sebanyak 7 orang (9%).

Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Per 31 Agustus 2025 berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan Jenis Kelamin selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Agustus 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	2	3	1	1	7
4	D3	0	2	1	1	4
5	S1	12	28	4	17	61
6	S2	3	4	0	0	7
7	S3	0	0	0	0	0
	Jumlah					**79**

Sumber : Dinas Koperasi dan UM,2025

Gambar 2.3
Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Per 31 Agustus 2025

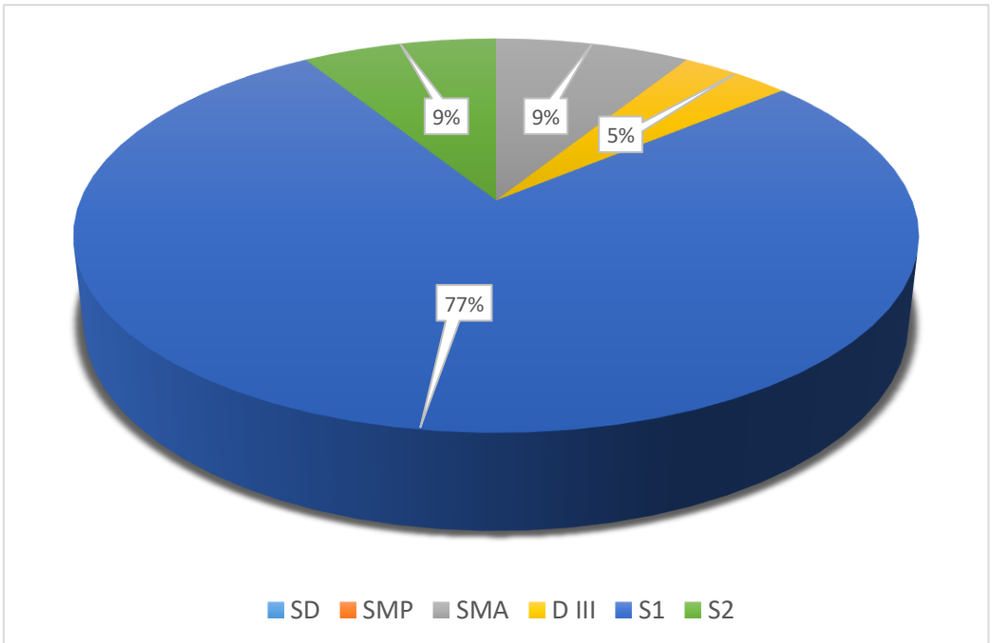

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Per 31 Agustus 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	2	**2**
2	Golongan III	17	30	**47**
3	Golongan IV	1	4	**5**
Jumlah		**18**	**36**	**54**

Sumber : Dinas Koperasi dan UM,2025

Gambar 2. 4
Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Per 31 Agustus 2025

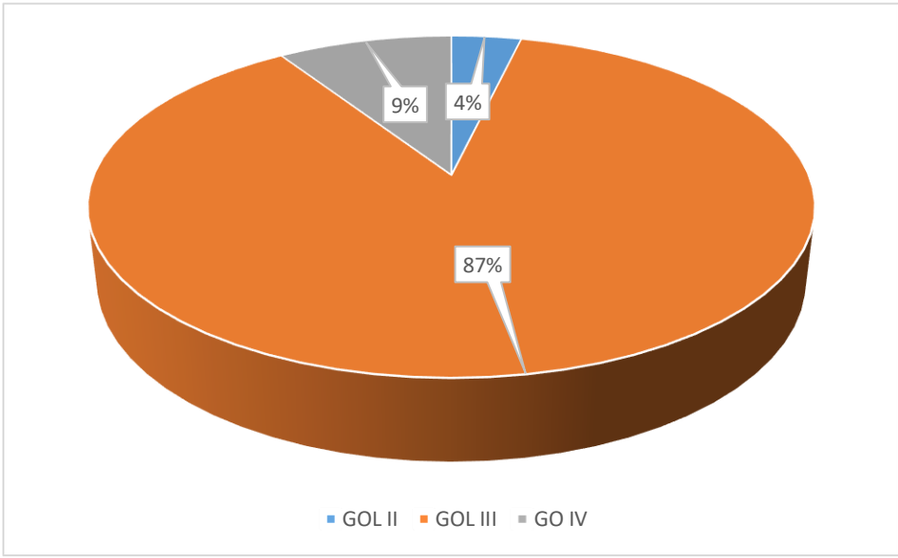

Tabel 2. 1
Pejabat Struktural dan Sub Koordinator berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Agustus 2025

ESELON	PRIA	WANITA	JUMLAH
Eselon II	-	1 Orang	1 orang
Eselon III	1 orang	4 orang	5 orang
Eselon IV/subkoor	4 orang	5 orang	9 orang
JUMLAH	5 orang	10 orang	15 orang

Sumber : Dinas Koperasi dan UM,2025

Gambar 2.5
Diagram Pejabat Struktural dan Sub Koordinator
berdasarkan Jenis Kelamin

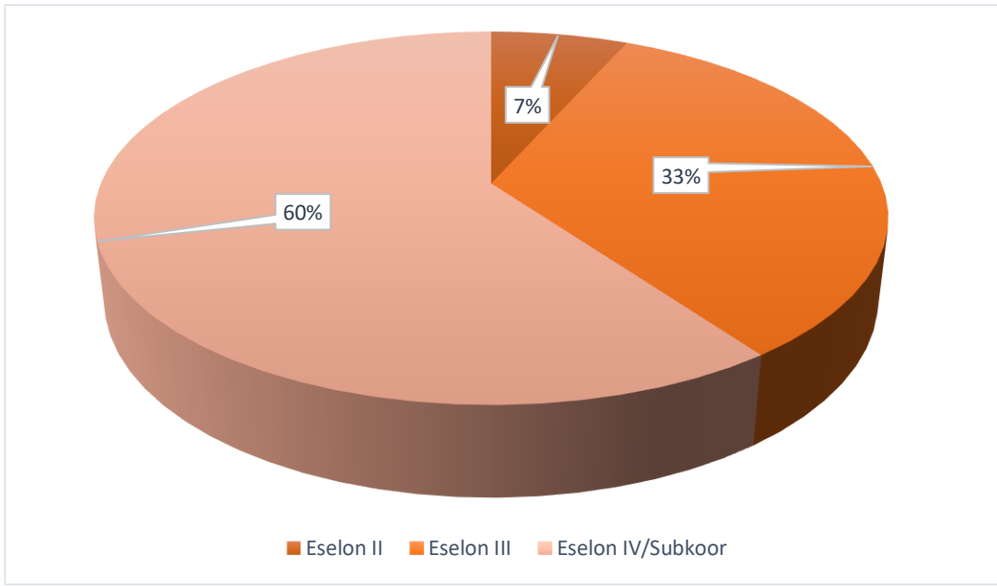

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Per 31 Agustus 2025

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
	Sarana Transportasi	
1	Roda 4	9
2	Roda 2	25
	Sarana Telekomunikasi	
1	Telepon	1
2	Faximile	1
3	HT	2
4	Telephone Mobile	4
	Peralatan dan Perlengkapan kantor	
1	PC	60
2	Laptop	33
3	Printer	24
4	Scanner	3

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
5	Mesin Fotocopy	2
6	Alat Penghancur Kertas	2
7	Proyektor	3
8	Tablet	2
9	Kamera Conference	1
10	Kamera	4
11	Handy Cam	3
12	Tripod Kamera	4
13	Drone	1
14	Wireless Mic	1
15	Sound System	6
16	Mesin Penghisap Debu	1
17	Lemari Es	5
18	Dispenser	6
19	Air Conditioner	41
20	Meja Kerja Pejabat Eselon	6
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon	6
22	Meja Tamu Biasa (Ruang Eselon III / Set)	5
23	Meja Staf	74
24	Kursi staf	74
25	Meja Petugas Piket	1
26	Meja Rapat	2
27	Meja Lipat Portabel	10
28	Kursi Putar Echo (Ruang Rapat)	20
29	Kursi Rapat Merah	20
30	Kursi Lipat	55
31	Kursi Roda	3
32	Sofa	5
33	Televisi	9
34	Lemari Besi	16
35	Lemari Kaca	2
36	Filing Cabinet Besi	6
37	Lemari Penyimpan	11
38	Rak Penyimpan	7
39	Brankas	1

Tabel 2.5
Aset Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				

NIHIL

Tabel 2.6
Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.001.001.001	000003	B	Bertingkat	Beton	2.217	Jalan Slamet Riyadi no.4, Kecamatan Gayamsari	12/8/2023	B/8306/050/XII/ 2023		Tanah Milik Pemda		Pembelian	4.936.756,30

2.1.2 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Capaian kinerja Pelayanan dan realisasi anggaran dalam mencapai kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Tujuan dan Sasaran																		
	Persentase Koperasi Berkualitas	%	v	-	NA	NA	53	54	55	NA	NA	65,42	58,91	59,72	NA	NA	123,43	109,09	108,58
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	%	v	-	NA	NA	12	13	14	NA	NA	16,93	17,17	17,40	NA	NA	141,08	132,08	124,29
	Prosentase koperasi aktif	%	v	-	NA	NA	76	76,50	77	NA	NA	76,64	77,04	77,58	NA	NA	100,84	100,71	100,75
	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	%	-	v	NA	NA	30	35	44	NA	NA	40,57	42,53	44,41	NA	NA	135,23	121,51	100,93
	Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Nilai	-	v	NA	NA	77,20	77,50	80.25	NA	NA	79,71	80	80,25	NA	NA	103,25	103,23	100,00
	Indikator kinerja kunci																		
	Persentase Koperasi Berkualitas	%	v	-	NA	NA	53	54	55	NA	NA	65,42	58,91	59,72	NA	NA	123,43	109,09	108,58
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	%	v	-	NA	NA	12	13	14	NA	NA	16,93	17,17	17,40	NA	NA	141,08	132,08	124,29
	Persentase koperasi aktif	%	v	-	NA	NA	76	76,50	77	NA	NA	76,64	77,04	77,58	NA	NA	100,84	100,71	100,75
	Indikator SPM																		
	..				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indikator TPB																		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan. (8.3.1.(c)	%	-	v	6	6,5	7	7,5	8	11,30	10,62	7,97	8,04	7,94	188,33	163,38	113,86	107,2	99,25

Adapun capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

a) Pemberdayaan Koperasi

Di sektor pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah Koperasi di Kota Semarang selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan, dimana jumlah koperasi pada tahun 2020 sebanyak 718 unit meningkat menjadi 736 unit pada akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan efektifnya kegiatan sosialisasi perkoperasian kepada kelompok masyarakat yang diadakan setiap tahunnya

Sedangkan jika dilihat dari jumlah koperasi aktif mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif sebanyak 637 Unit, meningkat menjadi 638 unit pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 jumlah koperasi aktif turun menjadi 561 unit koperasi. Hal tersebut antara lain karena adanya pendataan ulang atas koperasi yang ada serta adanya usulan pembubaran ke Kemenkumham terhadap koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya untuk tahun 2023 jumlah koperasi aktif meningkat kembali 567 dan pada tahun 2024 menjadi 571 Unit Koperasi.

Meskipun jumlah koperasi aktif sempat mengalami penurunan namun secara persentase koperasi aktif yang juga merupakan indikator sasaran dan indikator Kinerja Daerah pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021-2026 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan.

Berikut disajikan perkembangan jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif, dalam grafik berikut :

Gambar 2.6
Perkembangan Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif
Tahun 2020-2024

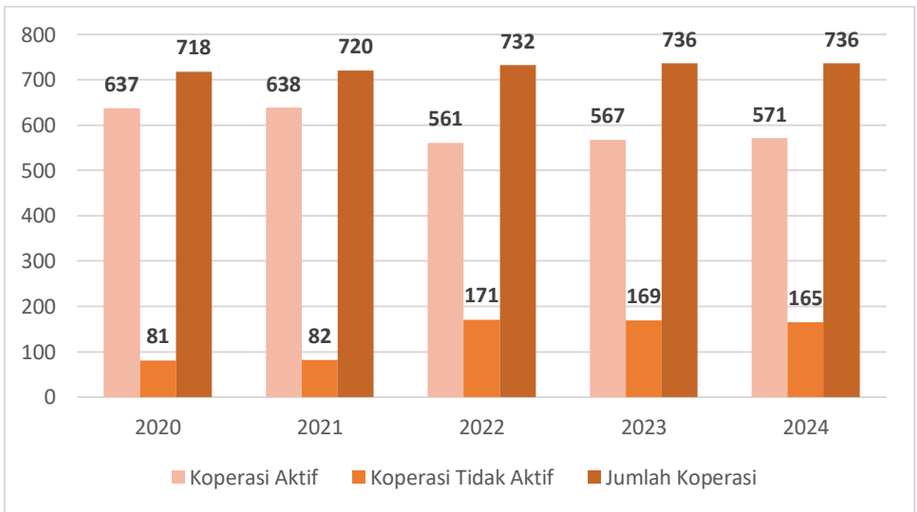

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Meskipun mengalami peningkatan Jumlah Koperasi, terdapar perubahan jumlah anggota Koperasi secara fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi sebanyak 165.573 orang dan turun hingga tahun 2022 menjadi 156.255 orang. Adapun tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah anggota koperasi menjadi 185.440 orang namun pada tahun 2024 turun menjadi 137.758 orang.

Perkembangan jumlah anggota koperasi dari tahun 2020-2024 dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.7
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2020-2024

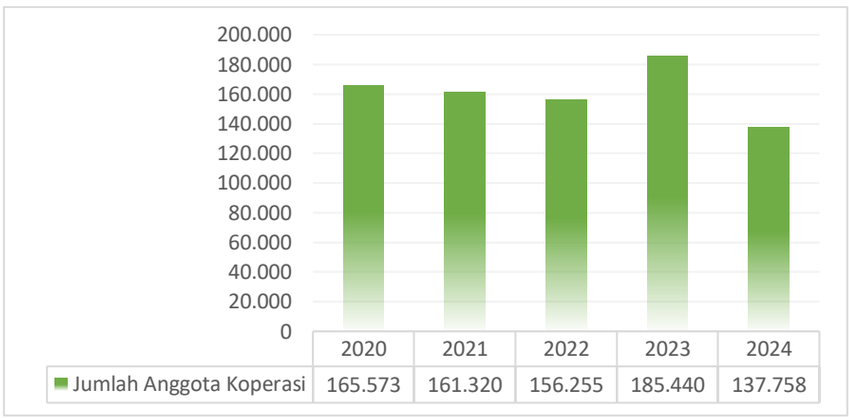

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Pertumbuhan jumlah Koperasi yang sudah ber-NIK mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 jumlah koperasi yang sudah ber-NIK semula 489 koperasi meningkat menjadi 630 koperasi pada akhir tahun 2024.

Grafik di bawah menyajikan perkembangan jumlah koperasi yang sudah ber NIK.

Gambar 2.8
Perkembangan Jumlah Koperasi yang sudah ber- NIK
Tahun 2020-2024

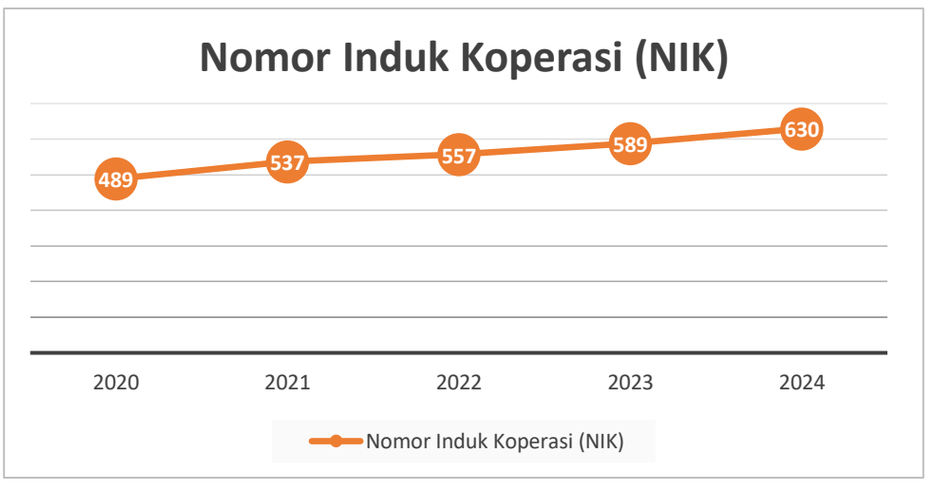

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Fluktuasi jumlah koperasi juga berdampak pada perkembangan jumlah Aset dan omset koperasi. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pula terhadap kinerja Koperasi. Perkembangan Aset dan Omzet Koperasi terus berfluktuasi dari tahun 2020 hingga pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2020 total asset koperasi sebesar Rp. 1.707.697.824,- dan Omset sebesar Rp. 1.396.573.433,-. Namun pada tahun 2024 jumlah Aset turun menjadi sebesar Rp. 1.519.615.177,- dan omset sebesar Rp. 963.332.796,-

Penurunan tersebut antara lain karena masih banyaknya Koperasi dalam proses pemulihan pasca pandemi covid-19, selain itu adanya pemindahan AD-ART dari Koperasi Tingkat Kota Semarang ke Koperasi

Tngkat Provinsi Jawa Tengah, serta terdapat beberapa koperasi yang diusulkan pembubaran karena tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut.

Perkembangan aset dan omset Koperasi di Kota Semarang secara lengkap disajikan dalam grafik 2.8 sebagai berikut :

Gambar 2.9
Perkembangan Jumlah Aset dan Omset Koperasi Tahun 2020 – 2024

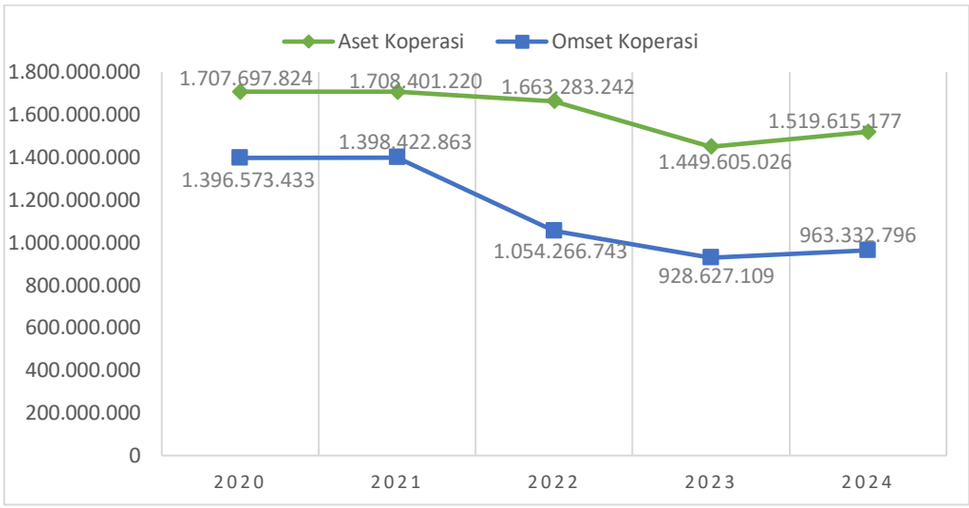

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Dari sisi fasilitasi akses Pembiayaan, Perkembangan Jumlah Koperasi yang telah mengakses Kredit Wibawa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.10
Perkembangan Jumlah Koperasi yang mengakses Kredit Wibawa dan Akumulasi Total Pinjaman Kredit Wibawa oleh Koperasi
Tahun 2020-2024

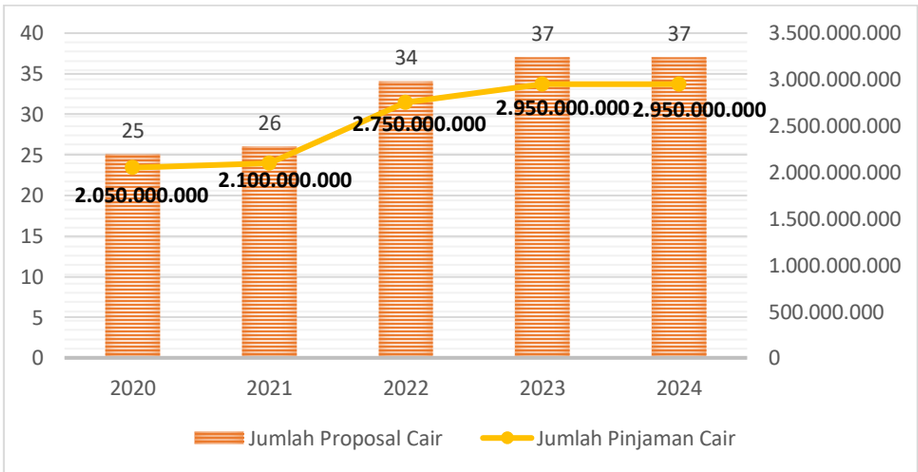

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

b) Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Semarang

Jumlah Usaha Mikro di kota Semarang yang tercatat dalam Sistem Informasi Usaha Mikro (Si UMI) Kota Semarang sejak tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2020 tercatat 21.509 pelaku usaha mikro dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 36.613 pelaku usaha mikro atau meningkat sebesar 70,22 %.

Perkembangan jumlah pelaku usaha mikro tersebut dapat dilihat secara lengkap pada grafik 2.10 berikut :

Gambar 2.11
Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang tercatat
dalam SI-UMI Tahun 2021-2024

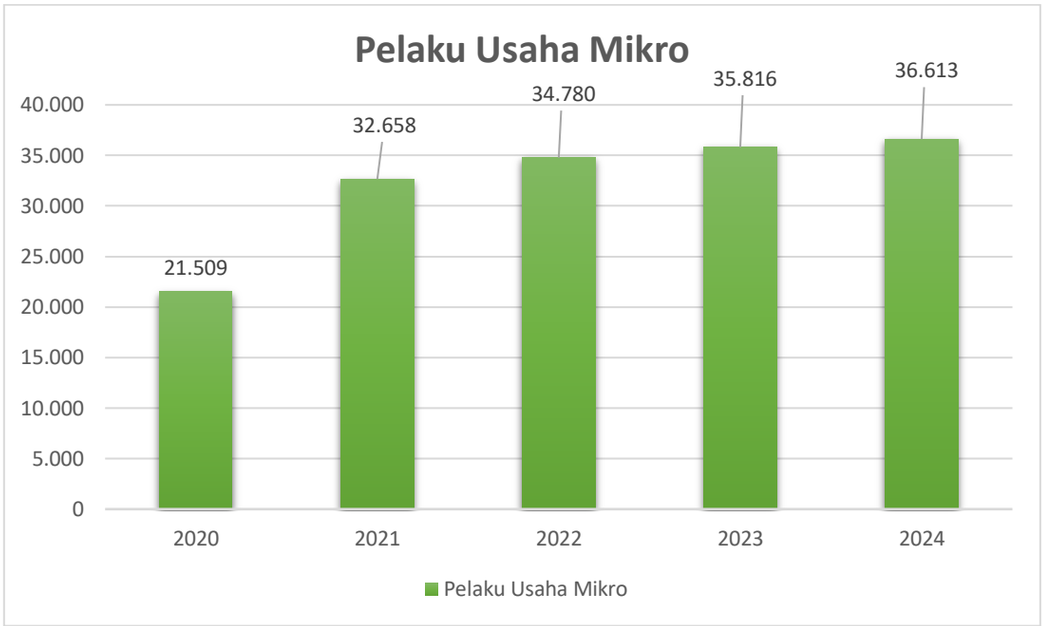

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Sedangkan perkembangan jumlah pelaku usaha mikro berdasarkan gender dapat dilihat seraca lengkap pada grafik 2.11 berikut:

Gambar 2.12
Data pelaku usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan Gender
Tahun 2020-2024

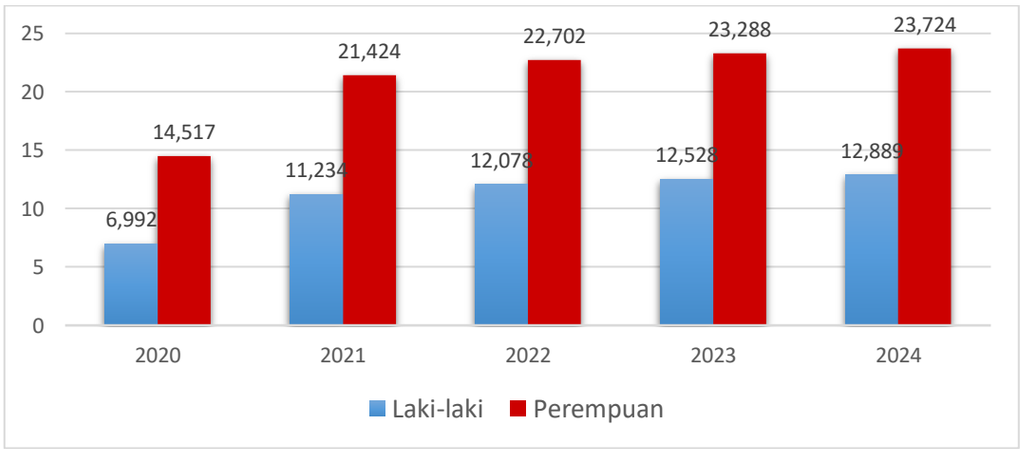

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Semarang juga diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerjanya. Dimana jumlah tenaga kerja yang semula 30.873 orang pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 36.617 orang.
Berikut ini Gambar 2.12. yang menyajikan perkembangan jumlah tenaga kerja UMKM.

Gambar 2.13
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Gambar 2.14
Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Gender Tahun 2020 – 2024

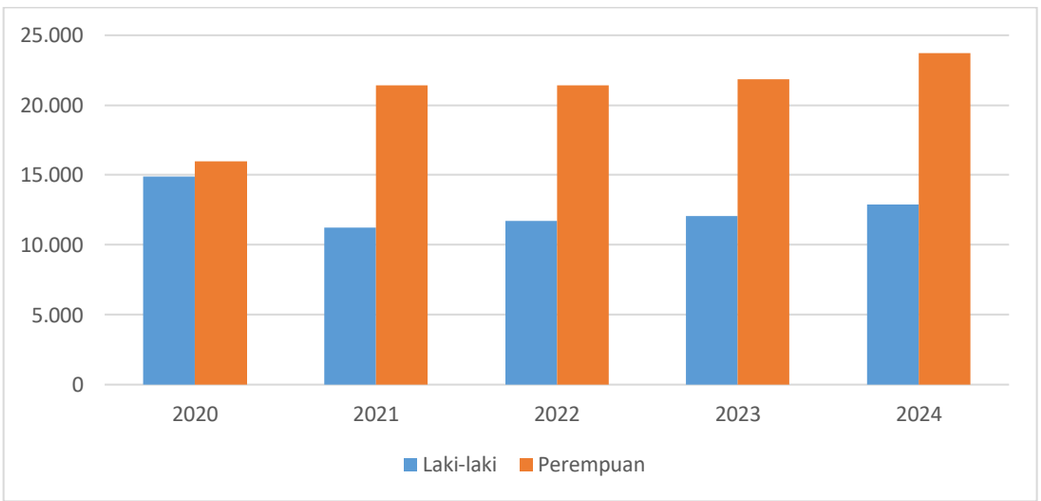

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Perkembangan jumlah UMKM juga diikuti perkembangan aset dan omset UMKM dimana pada tahun 2020 aset UMKM sebesar Rp. 38.119.746.068,- meningkat menjadi Rp. 159.290.344.576,- pada tahun 2024. Sedangkan omset UMKM pada tahun 2020 sebesar Rp. 119.684.624.028,- meningkat menjadi Rp. 573.139.837.731,- pada tahun 2024. Peningkatan aset dan omset tersebut dapat dilihat pada grafik 2.13 berikut :

Gambar 2.15
Perkembangan Aset dan Omset UMKM Tahun 2020-2024

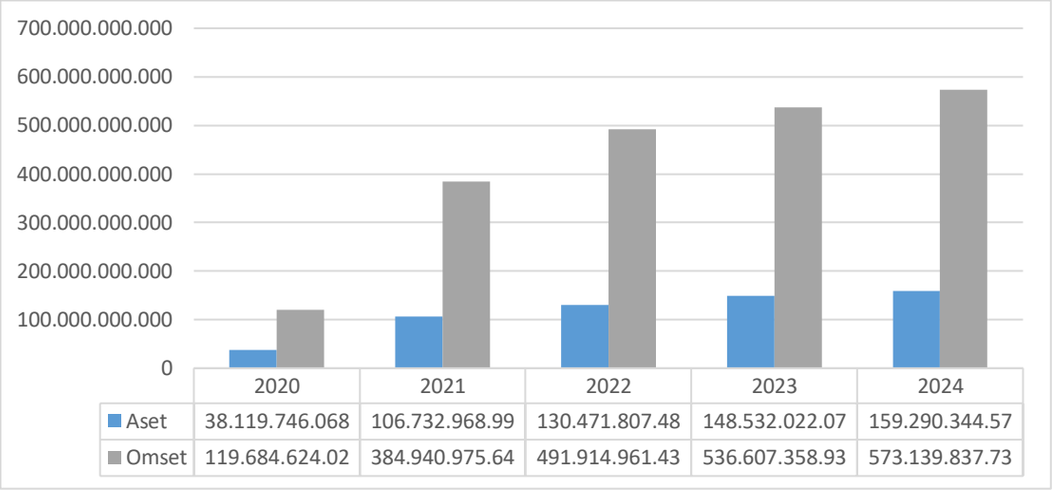

	2020	2021	2022	2023	2024
Aset	38.119.746.068	106.732.968.99	130.471.807.48	148.532.022.07	159.290.344.57
Omset	119.684.624.02	384.940.975.64	491.914.961.43	536.607.358.93	573.139.837.73

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 4 P Yaitu Pendampingan, Pelatihan, Pembiayaan dan Pemasaran.

Adapun Salah satu permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM adalah masalah permodalan. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang mempunyai program KREDIT WIBAWA (Wirausaha Bangkit menjadi Jawara) yaitu pinjaman untuk koperasi dan UMKM dengan bunga rendah sebesar 3% pertahun dengan jangka waktu 2 tahun dan tanpa anggunan untuk pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,-

Perkembangan pelaku Usaha Mikro yang mengakses kredit wibawa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlah Pelaku Usaha Mikro baru sebanyak 1.899 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 13.338.500.000, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 2.416 orang pelaku Usaha Mikro dengan total nilai pinjaman sebesar Rp. 17.591.500.000,- atau meningkat sebesar 31,88%.

Perkembangan jumlah pelaku usaha mikro yang telah mengakses Kredit wibawa dan jumlah pinjaman secara lengkap disajikan pada Grafik 2.15 sebagai berikut :

Gambar 2.16
Perkembangan Pencairan Kredit Wibawa bagi UMKM
Tahun 2021-2024

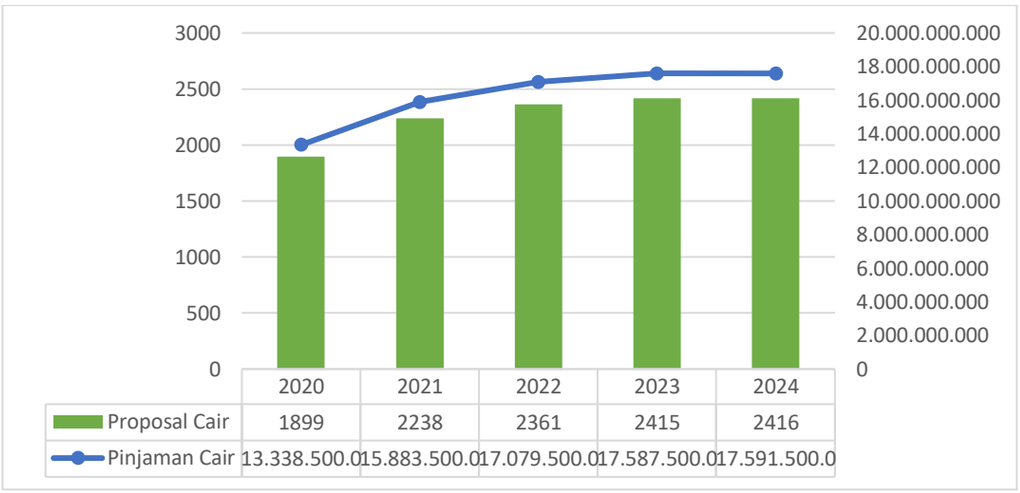

	2020	2021	2022	2023	2024
Proposal Cair	1899	2238	2361	2415	2416
Pinjaman Cair	13.338.500.0	15.883.500.0	17.079.500.0	17.587.500.0	17.591.500.0

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang

Dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tersebut diatas, setiap kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dirancang serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta melibatkan partisipasi aktif perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, setiap kegiatan diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Selain itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga sudah mengakomodir program nasional yaitu program pengentasan kemiskinan dan penanganan Stunting sebagai OPD Pendukung sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Adapun sub kegiatan yang tertagging program pengentasan kemiskinan dan penanganan Stunting yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kemiskinan).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kemiskinan).
- Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi (Kemiskinan).
- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro (stunting)
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Kemiskinan).
- Pemulihan Usaha Mikro (Kemiskinan).
- Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro (Kemiskinan).
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Kemiskinan).
- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (Kemiskinan, Stunting).

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Rasio antara realisasi dan anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang selama periode 2021 – 2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif antara lain karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran selama periode 2021 – 2024 adalah sebesar 10,40 % dan rata-rata realisasi pendanaan sebesar 14,24 %. artinya bahwa setiap tahun jumlah anggaran yang dialokasikan meningkat rata-rata 10,40%. Dan dari anggaran yang dialokasikan penyerapan atau realisasinya setiap tahun tumbuh rata-rata 14,24%. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan realisasi (14,24%) lebih tinggi daripada pertumbuhan alokasi (10,40%) yang juga menunjukkan penyerapan anggaran semakin efektif, bahkan lebih cepat daripada peningkatan jumlah anggaran yang disediakan.

Adapun alokasi anggaran dan realisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang periode 2021 – 2024 selengkapnya ditampilkan dalam tabel 2.8.

Tabel 2.8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NA	8,716,673,017	9.458.117.635	11.674.610.355	12.185.617.086	NA	8,002,383,663	8.622.578.214	10.717.987.308	11.791.519.646	NA	NA	91,17	91,81	96,77	12,11	14,02
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	NA	189,916,820	201.129.570	214.521.290	160.941.690	NA	145,913,100	143.908.180	179.015.180	141.851.900	NA	NA	71,55	83,45	88,14	-4,14	0,75
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	NA	256,267,400	357.931.270	423.919.290	475.289.000	NA	183,162,850	284.322.820	322.487.720	425.084.340	NA	NA	79,44	76,07	89,44	23,41	33,49
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	NA	508,309,000	171.753.490	366.205.089	304.231.220	NA	405,601,000	143.757.000	289.851.039	260.034.765	NA	NA	83,70	79,15	85,47	10,03	8,93
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	NA	852,277,846	1.334.864.790	569.033.650	657.194.500	NA	722,693,250	1.202.348.687	519.405.316	518.156.626	NA	NA	90,07	91,28	78,84	4,91	3,11
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	NA	1,713,421,640	2.095.711.980	2.644.277.614	2.507.615.933	NA	1,299,591,537	1.613.050.706	2.147.640.122	2.033.345.845	NA	NA	76,97	81,22	81,09	14,44	17,31

NO	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	NA	5,605,657,600	3.884.300.450	3.712.800.110	3.309.150.906	NA	3,451,807,001	2.740.723.729	3.075.913.298	2.712.856.127	NA	NA	70,56	82,85	81,98	-15,33	-6,72
8.	Program Pengembangan UMKM	NA	3,900,346,800	4.996.418.680	12.221.316.838	4.963.346.885	NA	3,423,806,688	4.101.392.956	11.239.232.050	3.958.120.895	NA	NA	82,09	91,96	79,75	37,77	43,01
Rata-rata pertumbuhan																	**10,40%**	**14,24 %**

c. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang selama ini berkolaborasi dengan stakeholder dan organisasi Perangkat daerah lainnya yaitu antara lain :

- Fasilitasi Perijinan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan DPMPTSP Kota Semarang.
- Fasilitasi sertifikasi Produk seperti PIRT, Halal, HAKI Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Kemenkumham dan MUI.
- Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro bekerjasama dengan Lembaga perbankan antara lain Bank Jateng dan Bank Himbara.
- Fasilitasi Akses Pemasaran secara online bekerja sama dengan Marketplace yang ada (Shopee Gojek, Grab dan Tiktok), Indomaret, Uniglo, Tokopedia serta Fasilitasi akses Kemitraan antara lain dengan Marimas, Sukasari, Rosebrand dan SRC(Sampoerna retail Community)

Selanjutnya dalam peningkatan pemeberdayaan koperasi dan usaha mikro di kota Semarang akan dikembangkan kemitraan dengan stekholder lainnya termasuk dengan Perguruan Tinggi.

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang khususnya dalam memberikan Fasilitasi permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang melalui Program Kredit Wibawa yaitu program bantuan permodalan dari Pemerintah Kota Semarang untuk Koperasi dan usaha Mikro dengan bunga rendah yaitu 3% pertahun tanpa agunan dengan maksimal pinjaman Rp. 5.000.000,- dalam jangka waktu 2 Tahun, sampai saat ini didukung oleh BPD Jateng dan BUMD Bank Pasar selaku Bank Channel yang menyalurkan dana kredit wibawa tersebut.

2.1.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

1) Akses Permodalan yang Terbatas
   Banyak UMKM dan koperasi kesulitan memperoleh pinjaman karena keterbatasan jaminan dan rekam jejak keuangan.
2) Kurangnya Literasi Keuangan dan Digital
   Masih banyak pelaku usaha yang belum melek teknologi dan keuangan, sehingga kesulitan dalam pencatatan, pemasaran, dan manajemen usaha.
3) Kualitas SDM yang Belum Merata
   Rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan menghambat pertumbuhan Pelaku usaha Mikro.
4) Legalitas dan Kepatuhan Regulasi

Banyak UMKM belum berbadan hukum atau belum memiliki izin usaha, membuat mereka sulit mengakses bantuan dan pembiayaan formal.

5) Persaingan Pasar yang Ketat
Persaingan dengan produk impor dan brand besar membuat UMKM perlu meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk.

6) Kapasitas Produksi dan Skala Usaha Terbatas
Sulit memenuhi permintaan pasar besar karena keterbatasan sumber daya dan teknologi.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Kontribusi Besar Terhadap Ekonomi

- UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja.
- Koperasi memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi berbasis komunitas.

2) Dukungan Pemerintah

- Adanya kebijakan pro UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan digital, dan kemudahan perizinan (OSS).
- Program-program pemberdayaan dan stimulus ekonomi pascapandemi.

3) Transformasi Digital

- E-commerce dan fintech membuka akses pasar dan pembiayaan lebih luas.
- Digitalisasi memungkinkan efisiensi operasional dan perluasan jangkauan.

4) Potensi Pasar Domestik yang Besar

- Populasi Indonesia yang besar menjadi pasar potensial untuk produk UMKM dan koperasi.
- Tren produk lokal dan ramah lingkungan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk UMKM.

5) Kolaborasi dan Kemitraan

- Peluang kerja sama dengan swasta (CSR), BUMN, maupun lembaga internasional

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2025 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu: "*Belum optimalnya kompetensi wirausaha lokal*" yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rumusan Permasalahan
"Belum optimalnya kompetensi wirausaha lokal"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Kota Semarang	Masih adanya Koperasi yang belum mematuhi regulasi perkoperasian.
		Kurangnya kesadaran koperasi akan pentingnya penilaian kesehatan sebagai alat pembinaan dan perbaikan kinerja.
2.	Belum optimalnya kelembagaan dan usaha koperasi	Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi pengurus dan pengelola koperasi
		Masih adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
		Belum optimalnya akses pembiayaan dan manajemen usaha koperasi
3.	Kurangnya daya saing produk Usaha Mikro	Belum optimalnya kemitraan usaha Mikro
		Belum optimalnya legalitas kelembagaan usaha mikro
		Belum optimalnya kualitas usaha dan produk unggulan usaha mikro
		Belum optimalnya pemanfaatan akses pembiayaan (Feasible tapi Tidak Bankable)
		Belum optimalnya standarisasi produk usaha mikro
		Belum optimalnya keterampilan dan kapasitas daya saing SDM Usaha Mikro
4.	Keterbatasan Akses Pemasaran dan Kurangnya Pemanfaatan Digitalisasi	Belum optimalnya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya melalui sinergitas antara pelaku usaha mikro, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan media.

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan platorm digital dalam pemasaran produk usaha mikro
5.	Belum optimalnya kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Belum optimalnya pencapaian kinerja Perangkat Daerah
		Belum optimalnya kualitas layanan Dinkop UM

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Masih adanya Koperasi yang belum mematuhi regulasi perkoperasian
2. Kurangnya kesadaran koperasi akan pentingnya penilaian kesehatan sebagai alat pembinaan dan perbaikan kinerja.
3. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi pengurus dan pengelola koperasi
4. Masih adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
5. Belum optimalnya akses pembiayaan dan manajemen usaha koperasi
6. Belum optimalnya kemitraan usaha Mikro
7. Masih banyaknya pelaku Usaha Mikro yang belum memiliki legalitas
8. Belum optimalnya kualitas usaha dan produk UMKM
9. Masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum feasible
10. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro
11. Belum optimalnya sinergi antara UMKM, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan media dalam mendukung pemasaran produk UMKM
12. Masih mengandalkan pemasaran konvensional dan belum optimal memanfaatkan platform digital.
13. Belum optimalnya pencapaian kinerja Perangkat Daerah
14. Belum optimalnya kualitas layanan Dinkop UM

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Banyaknya isu strategis pada lingkup global dan regional menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi di baik Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi daerah, tak terkecuali Kota Semarang. Beberapa isu global apabila direspon dengan baik akan menjadi faktor pendukung bagi percepatan pembangunan, namun sebaliknya, akan menjadi faktor penghambat apabila pemerintah daerah dan stakeholder lainnya gagal menemukan strategi untuk merespon isu tersebut. Berikut merupakan isu pada lingkup global dan regional yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029 :

a. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan logi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, teknoHyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production

Lifecycle Management, Robotic Process Automstion (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Disrupsi teknologi akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan di masa depan, diantaranya:

1. Digitalisasi usaha pada UMKM dan koperasi dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha;
2. Sektor manufaktur mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok RANPERDA RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029 264 terlokalisasi, serta teknologi hijau termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan;
3. Sektor pendidikan meliputi inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis Artificial Intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinyu, tanpa terbatas ruang dan waktu;
4. Tergantikannya industri media dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), termasuk pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) yang berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan;
5. Pengusaha properti perkantoran dan real estate dapat terdampak akibat dari perkembangan pekerjaan dengan metode jarak jauh (remote working) atau work from anywhere (WFA);
6. Cara kerja pemerintah yang dapat terdampak dengan adanya peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya;
7. Proses pembenahan perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi dapat terbantu dengan perkembangan teknologi menjadi lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Kemampuan *stakeholder* di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan.

A. Masih Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi

yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

B. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, mematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022, angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382. Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. Pergeseran Struktur Kelas Menengah
Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat dan jumlahnya 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, populasi kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dalah rendahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

D. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

E. Krisis Lingkungan Perkembangan dunia
saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particular matter 2,5 (WHO, 2021).

Sekitae 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (BPS, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah meruapakan sampah makanan. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragam hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko triple planetary crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hak yang perlu diprioritaskan.

F. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti teknan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Krisis energi dan pangan dapat memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bungan yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

G. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dan Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia juga masih mengalami tantangan meskipun memiliki tren yang positif. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam

pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Beberapa fokus Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN dan merupakan isu-isu nasional yang sesuai dengan lingkup dan tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah :
Masih Rendahnya Produktivitas.

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dan menyebabkan menurunannya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi sekolah swasta gratis, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi

diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial rumah inspirasi, dan pendampingan kelompok disabilitas seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi aman dan layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, bussiness matching dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara

pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada par dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), peremajaan armada BRT secara merata dan proporsional di seluruh koridor, perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif bagi wilayah yang berhasil mengelola ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun

kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Visi dan misi Kota Semarang didukung dengan tagline:

Tabel 2.10
Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat!	
Bangun Infrastruktur Berkualitas	Humanis dalam Melayani
Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan	Ekonomi Inklusif
Ramah Lingkungan	Budaya yang Dilestarikan
Sosial Harmonis Tanpa Konflik	Aksesibilitas Meningkat
Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin	Tangguh menghadapi Tantangan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Utamakan Kesejahteraan Bersama	

Tujuan dari setiap pokok visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif, dirumuskan tujuan sebagai berikut:
   a. Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Tujuan ini diimplementasikan dengan meningkatkan potensi sumber daya lokal yang berdaya saing global berlandaskan riset dan inovasi. potensi sumber daya lokal yang melimpah. Produk-produk unggulan, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif, didorong untuk masuk ke pasar global melalui promosi internasional dan pengembangan jaringan perdagangan. Hal ini dapat menjadikan Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang maju.
   b. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata, dan inklusif diharapkan mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Infrastruktur merupakan tulang punggung bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang efisien antar wilayah, baik dalam bentuk jaringan transportasi, jalan raya, jembatan maupun utilitas publik seperti air bersih, listrik, dan internet. Konektivitas antar wilayah ditingkatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa secara efisien.
   c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya kualitas sumber daya manusiaakan meningkatkan indeks pembangunan Manusia Kota Semarang sehingga sumber daya manusia Kota Semarang akan unggul, produktif dan berbudaya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dan meningkatkan daya saing Kota Semarang.
   d. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Penciptaan lingkungan sosial yang harmonis dan stabilitas politik yang kondusif merupakan prioritas utama. Melalui dialog terbuka, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebhinekaan, Kota Semarang bertekad untuk menjaga kerukunan antarwarga dan menghindari konflik sosial. Stabilitas politik yang terjaga akan mendukung pembangunan berkelanjutan,

sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan-kebijakan yang inklusif dan adil.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari misi kesatu, misi kedua, misi keempat, dan misi kelima.

2. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif, dirumuskan tujuan Menurunnya kemiskinan secara inklusif, Penurunan kemiskinan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penjaminan ketersediaan pangan, sandang, dan papan dan memastikan bahwa semua warga Kota Semarang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar ini, sehingga diharapkan juga akan meningkatkan kualitas keluarga. Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketiga.
3. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat, Kota Semarang berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi semua warga. Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi keenam.
4. Pada pokok visi Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat, Meningkatnya tata kelola pemerintahan menjadi prioritas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Proses administrasi dipermudah dan dipercepat melalui digitalisasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Tata kelola pemerintahan yang matang dan berbasis data merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketujuh.

Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	POKOK VISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN
1	Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%
		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka
		Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Angka

NO	POKOK VISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN
2	Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif	Menurunnya kemiskinan secara inklusif	Angka Kemiskinan	%
			Rasio Gini	Angka
3	Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat	Nilai Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota	Nilai
4	Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka

Dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut diatas telah dirumuskan **sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029** sebagai berikut:

1) Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, melalui indikator LPE Sektor Perdagangan dan Jasa
   - Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, melalui PMTB terhadap PDRB.
   - Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa, melalui indikator tingkat inflasi
2) Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan, melalui indikator tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah.
   - Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis, melalui indikator tingkat pengembangan kawasan strategis.
3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan, diukur melalui Indeks Kesehatan.
   - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata, diukur melalui Indeks Pendidikan.
   - Meningkatnya kesetaraan gender, melalui Indeks Pembangunan Gender.
4) Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya kualitas demokrasi politik, melalui indikator indeks demokrasi Indonesia

- Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan, melalui angka kriminalitas.

5) Menurunnya kemiskinan secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Menurunnya beban pengeluaran masyarakat, melalui Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
   - Meningkatnya pendapatan masyarakat , melalui PDRB per kapita.
   - Meningkatnya akses lapangan kerja, melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
6) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Menurunnya dampak perubahan iklim, melalui indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Indek Kualitas Lingkungan Hidup.
   - Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan, melalui indikator Indeks risiko bencana.
   - Menurunnya kawasan banjir dan rob, melalui indikator persentase kawasan banjir dan rob.
7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat . Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional.
   - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.
   - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Selanjutnya sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan Urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian pokok Visi "*Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif*" pada Misi ke 3 yaitu **"Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak**" dan Misi ke 4 yaitu "**Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global**" dengan Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 "*Menurunnya kemiskinan secara inklusif*". Serta mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 :

1. “**Meningkatnya pendapatan masyarakat”** dengan indikator **PDRB per kapita.**
2. “**Meningkatnya akses lapangan kerja”** dengan indicator **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** dan **Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK).**

Keselarasan antara Visi, Pokok Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut ini.

Gambar 2.17
Peta Jalan Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan RPJMD
Kota Semarang Tahun 2025-2029

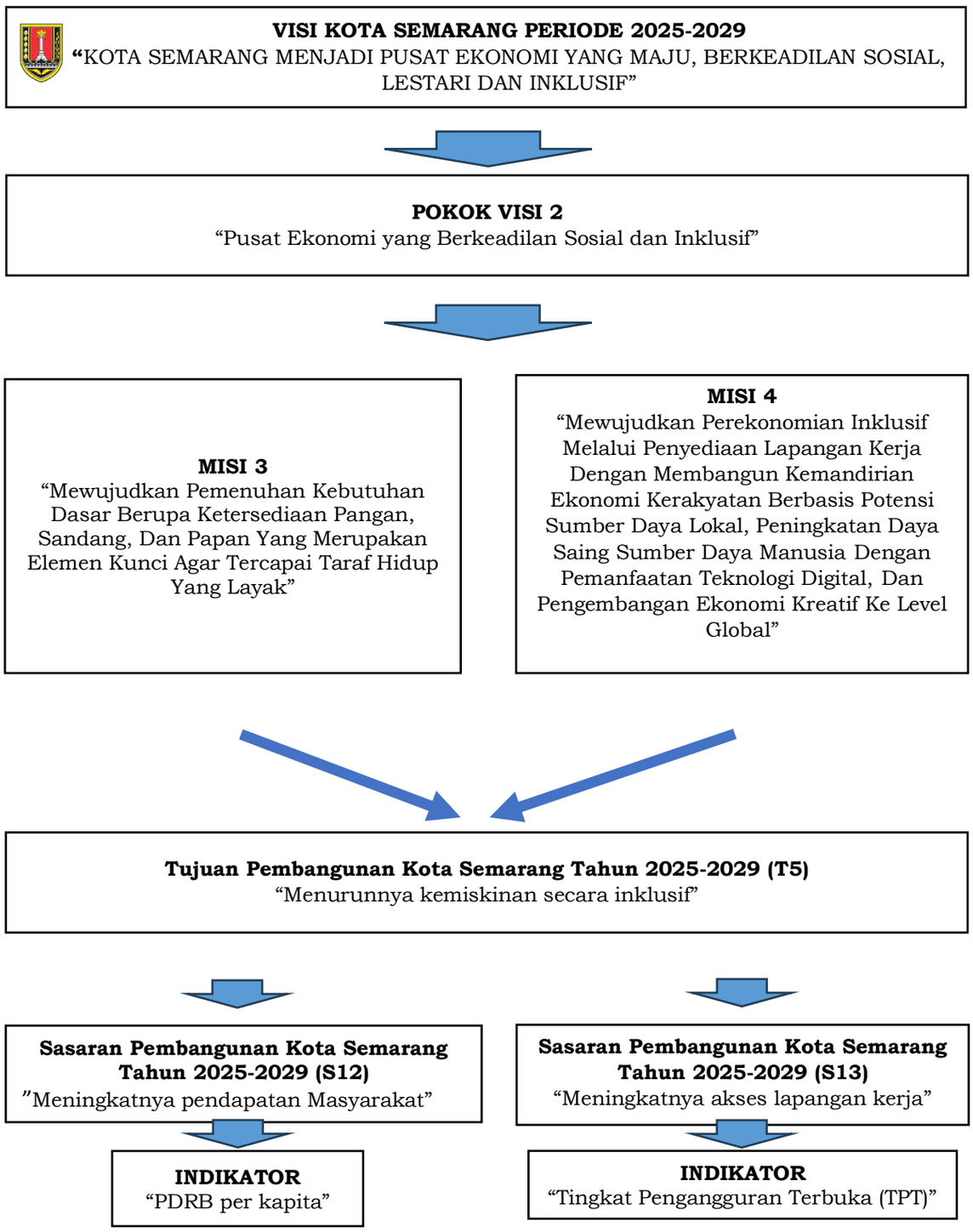

Tujuan menurunnya kemiskinan secara inklusif dijabrkan dengan sasaran menurunnya beban pengeluaran masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya akses lapangan kerja.

Menurunnya beban pengeluaran masyarakat dicapai dengan penuntasan kemiskinan dengan satu sistem terpadu dan terintegrasi dan perlindungan sosial adaptif integratif, pelaksanaan program bantuan sosial

dan jaminan sosial yang berkeadilan, serta penyediaan infrastruktur layanan dasar.

Menurunnya beban pengeluaran masyarakat di Kota Semarang dicapai melalui strategi penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Data Terpadu dan Terintegrasi, disertai perlindungan sosial adaptif integratif, pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang berkeadilan, serta penyediaan infrastruktur layanan dasar. Sistem Data Terpadu dan Terintegrasi berfungsi sebagai basis data tunggal yang mencakup seluruh informasi sosial-ekonomi penduduk, sehingga pemerintah dapat merancang, menargetkan, dan menyalurkan bantuan atau program pemberdayaan secara lebih tepat sasaran. Dengan sistem ini, intervensi terhadap kelompok rentan dapat dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi, memastikan mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang berkeadilan, seperti subsidi pangan, energi, dan transportasi, secara langsung meringankan beban biaya hidup keluarga miskin. Program ini juga memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa penting dengan harga terjangkau. Penguatan jaringan distribusi menjadi kunci agar kebutuhan pokok dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan harga yang wajar. Penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan yang sangat terjangkau, akan menurunkan pengeluaran rumah tangga secara signifikan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menekan biaya hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap layanan publik, dan mendukung aktivitas ekonomi secara tidak langsung.

Meningkatnya pendapatan masyarakat dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan dan iklim berusaha, serta peningkatan kesempatan kerja yang merata dan inklusif.

Pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi dirancang untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan berusaha. Penguatan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk pelatihan, pendampingan, dan akses digitalisasi pemasaran, secara langsung meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola, memasarkan, dan mengembangkan produk atau jasa mereka. Dengan demikian, UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Selain itu, pembentukan dan penguatan koperasi—baik koperasi simpan pinjam, jasa, usaha produktif, maupun ritel—mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi kolektif yang terorganisir. Koperasi menjadi wadah untuk memperoleh akses pembiayaan inklusif bagi mereka yang tidak dapat mengakses pinjaman bank konvensional, sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata. Hal tersebut juga sejalan dengan strategi peningkatan kesempatan kerja yang merata dan inklusif. Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi secara otomatis menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor dan wilayah, termasuk untuk kelompok yang sebelumnya kurang terlayani, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan operasional bagi RT/RW dan jejaring sinergi dengan akademisi, dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas memastikan bahwa pertumbuhan

ekonomi yang dihasilkan tidak hanya terpusat, tetapi tersebar merata di tingkat komunitas. Dengan integrasi antara penguatan kapasitas, akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, dan pengembangan koperasi, strategi ini efektif meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesempatan kerja masyarakat secara inklusif, selaras dengan strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.

Meningkatnya akses lapangan kerja dapat dicapai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Strategi ini menekankan pada penguatan keterampilan, kompetensi, dan kesiapan tenaga kerja agar mampu bersaing dan memenuhi tuntutan dunia usaha serta industri yang terus berkembang. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri menjadi langkah penting untuk memastikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dilakukan relevan dengan kebutuhan pasar kerja nyata. Kerjasama ini juga membuka peluang magang, penempatan kerja, dan pembelajaran langsung bagi tenaga kerja. Penyediaan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (link and match) memungkinkan masyarakat memperoleh keterampilan mulai dari tahap dasar hingga lanjutan secara sistematis untuk menjamin keterampilan yang diperoleh sesuai standar industri dan dapat diterapkan secara praktis. Pengembangan program pelatihan kerja bersertifikat juga mendukung strategi kualitas tenaga kerja, karena sertifikasi kompetensi menjadi bukti resmi kemampuan yang diakui oleh pasar kerja. Perluasan program kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal maupun informal memberikan perlindungan sosial dan rasa aman, sehingga tenaga kerja dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Pelatihan UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM serta peningkatan kepesertaan UMKM dan industri kreatif dalam kegiatan promosi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka kesempatan usaha baru yang menyerap tenaga kerja. Dengan integrasi antara penguatan keterampilan, sertifikasi, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM serta industri kreatif, seluruh program secara sistematis mendukung strategi peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga sasaran meningkatnya akses lapangan kerja dapat tercapai secara merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

c. Telaahan Renstra Kementerian Terkait

1) Telaah Renstra Kementerian Koperasi

Sejalan dengan amanat RPJMN 2025–2029 dan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, visi Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029 berpedoman pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025–2029. Visi pembangunan nasional yang menjadi pijakan adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Oleh karena itu, dirumuskan Visi Kementerian Koperasi adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Nasional yang Kuat, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini menggambarkan arah besar bangsa dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tekad untuk menjadi negara maju yang berdaulat, adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Pembangunan nasional dalam kerangka visi tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif,

berkelanjutan, dan berbasis inovasi, dengan memperkuat peran seluruh elemen bangsa, termasuk ekonomi kerakyatan.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab dalam memperkuat ekonomi rakyat, Kementerian Koperasi mengemban visi kelembagaan yang selaras dan menjadi bagian integral dari visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi tersebut diterjemahkan dalam upaya membangun koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional yang inklusif, produktif, dan berkeadilan. Koperasi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan kelembagaan yang mampu menjawab tantangan ketimpangan, keterbatasan akses, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi.

Dengan mengacu pada visi nasional tersebut, Kementerian Koperasi menetapkan arah pembangunan kelembagaan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dari bawah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas nasional, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Koperasi diharapkan menjadi lokomotif pembangunan yang mengedepankan prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Gambar 2.17
Peta Jalan Keselarasan Visi

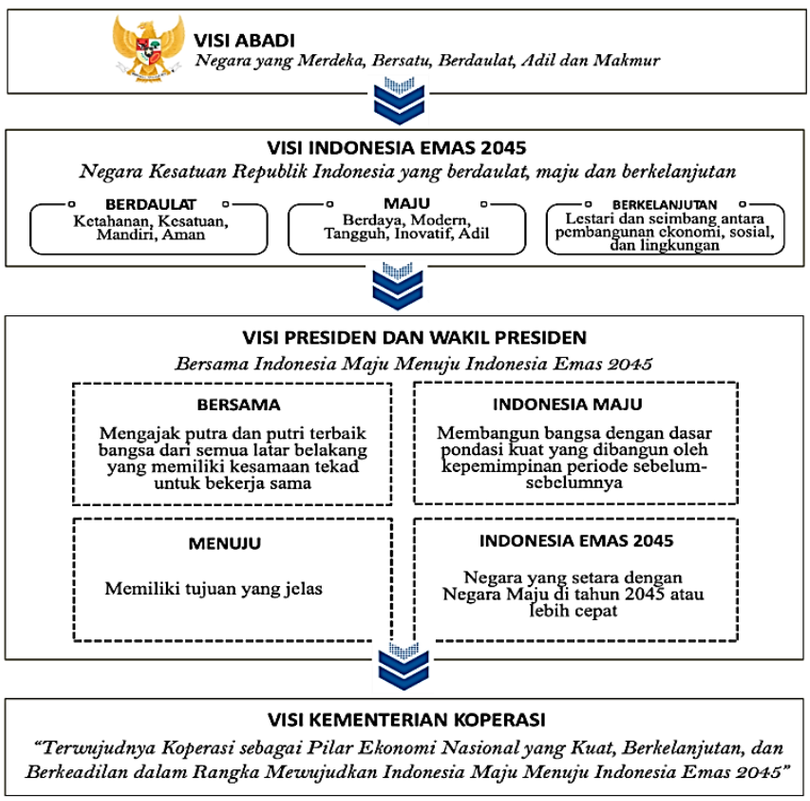

Selanjutnya, penyusunan Misi Kementerian Koperasi merupakan penjabaran dari Visi Kementerian Koperasi dan pokok-pokok Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu terutama ketercapaian pada Asta Cita nomor 2, 3, 5, dan 6, yaitu:

- Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

- Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Oleh karenanya, untuk mencapai langkah-langkah ketercapaian Misi tersebut di atas, maka Misi Kementerian Koperasi, yaitu:

- Misi Pertama: Mengembangkan tata kelola kelembagaan koperasi yang adaptif, akuntabel, dan sesuai prinsip demokrasi ekonomi
- Misi Kedua: Meningkatkan kapasitas usaha koperasi melalui penguatan sektor produksi, digitalisasi, dan jejaring usaha
- Misi Ketiga: Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia koperasi
- Misi Keempat: Mendorong budaya berkoperasi dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem koperasi
- Misi Kelima: Memperkuat sistem pembiayaan dan perlindungan usaha koperasi yang menjamin keberlanjutan
- Misi Keenam: Membangun Ekonomi dari Desa dan Mendorong Pemerataan

Adapun keselarasan antar Misi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.18
Peta Jalan Keselarasan Antar Misi

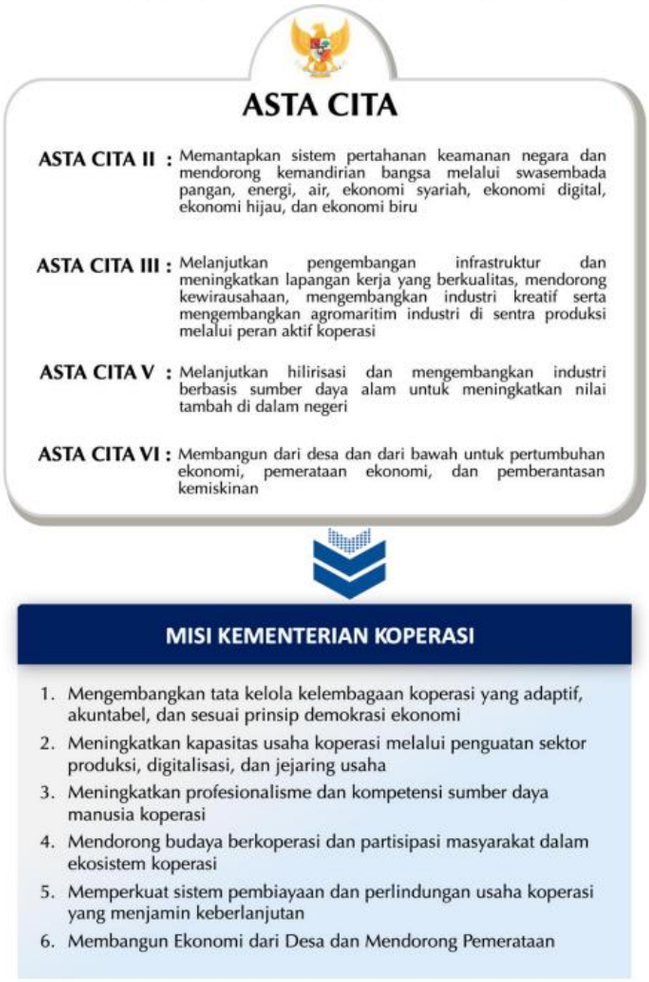

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas ditetapkan tujuan Kementerian Koperasi sebagai berikut :

Gambar 2.19
Peta Jalan Keselarasan Antara Misi dan Tujuan

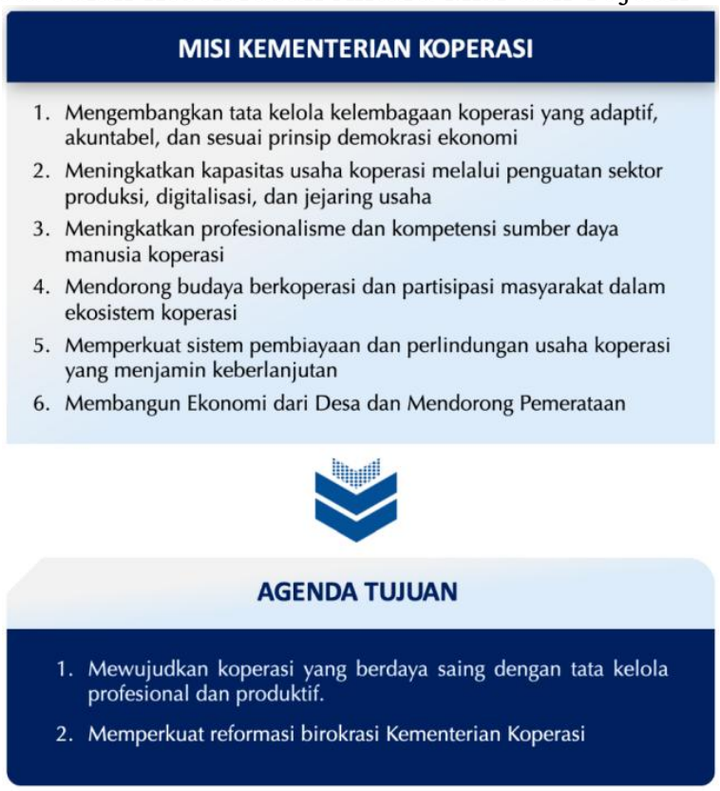

Dengan mengacu pada tujuan dari Kementerian Koperasi, maka sasaran strategis Kementerian Koperasi untuk periode 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi Indonesia

  Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional melalui penguatan kapasitas usaha koperasi yang berkelanjutan, modern, dan produktif. Fokus utama diarahkan pada penciptaan koperasi yang efektif, memiliki tata kelola usaha yang baik, serta mampu memperluas jaringan dan daya saing usahanya.
- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Indonesia dalam Perkoperasian

  Sasaran ini mencerminkan komitmen Kementerian Koperasi dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam gerakan koperasi sebagai bagian dari demokrasi ekonomi. Peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek jumlah anggota, tetapi juga dari kualitas keikutsertaan dalam tata kelola, pemanfaatan layanan, serta kontribusi terhadap pengembangan koperasi.

Peta jalan keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Koperasi digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.20
Peta Jalan Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Kementerian Koperasi

2) Telaah Renstra Kementerian UMKM

Visi Presiden dan wakil presiden terpilih 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang diwujudkan melalui 8 Misi yang dikenal sebagai Asta Cita. untuk mencapai langkah-langkah ketercapaian Visi dan misi tersebut diatas, Kementerian UMKM menetapkan Visi yaitu " Terwujudnya UMKM Naik kelas". Adapun keselarasan antar visi RPJPN dan RPJMP dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.21
Keselarasan RPJMN dan RPJMP Tahun 2025 - 2029

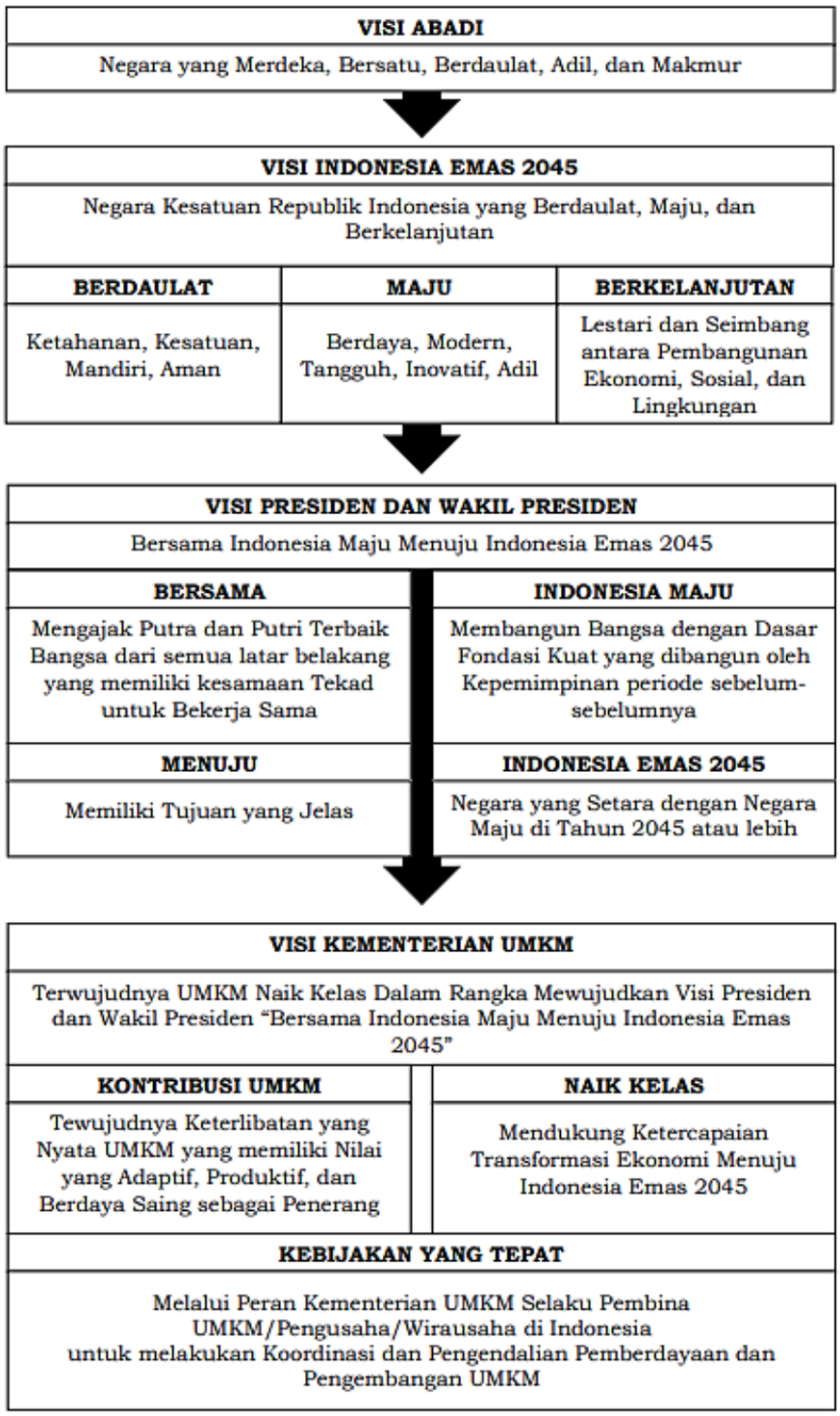

Sumber : Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025 – 2029

Selanjutnya, penyusunan Misi Kementerian UMKM merupakan penjabaran dari Visi diatas dan pokok-pokok Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu terutama ketercapaian pada :

- Asta Cita ke-III: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yaitu dalam hal Kontribusi Wirausaha dalam

Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi dari UMKM.

- Asta Cita II: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada, Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yaitu dalam hal Peran Pelaku Usaha yang Inklusif
- Asta Cita IV: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas, yaitu dalam hal Kesetaraan dalam Mengakses.
- Asta Cita V: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Pelaku Usaha.
- Asta Cita VI: Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yaitu dalam hal Keadilan dan Cipta Kerja yang Merata.
- Asta Cita VII: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yaitu dalam hal Reformasi Birokrasi pada Kementerian UMKM.

Oleh karenanya, untuk mencapai langkah-langkah ketercapaian Misi tersebut diatas, maka Misi Kementerian UMKM, yaitu:

- Misi Ke-I: Memperkuat Peran UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- Misi Ke-II: Terwujudnya Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik.

Adapun keselarasan antar Misi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.22
Keselaran antar Misi Tahun 2025 – 2029

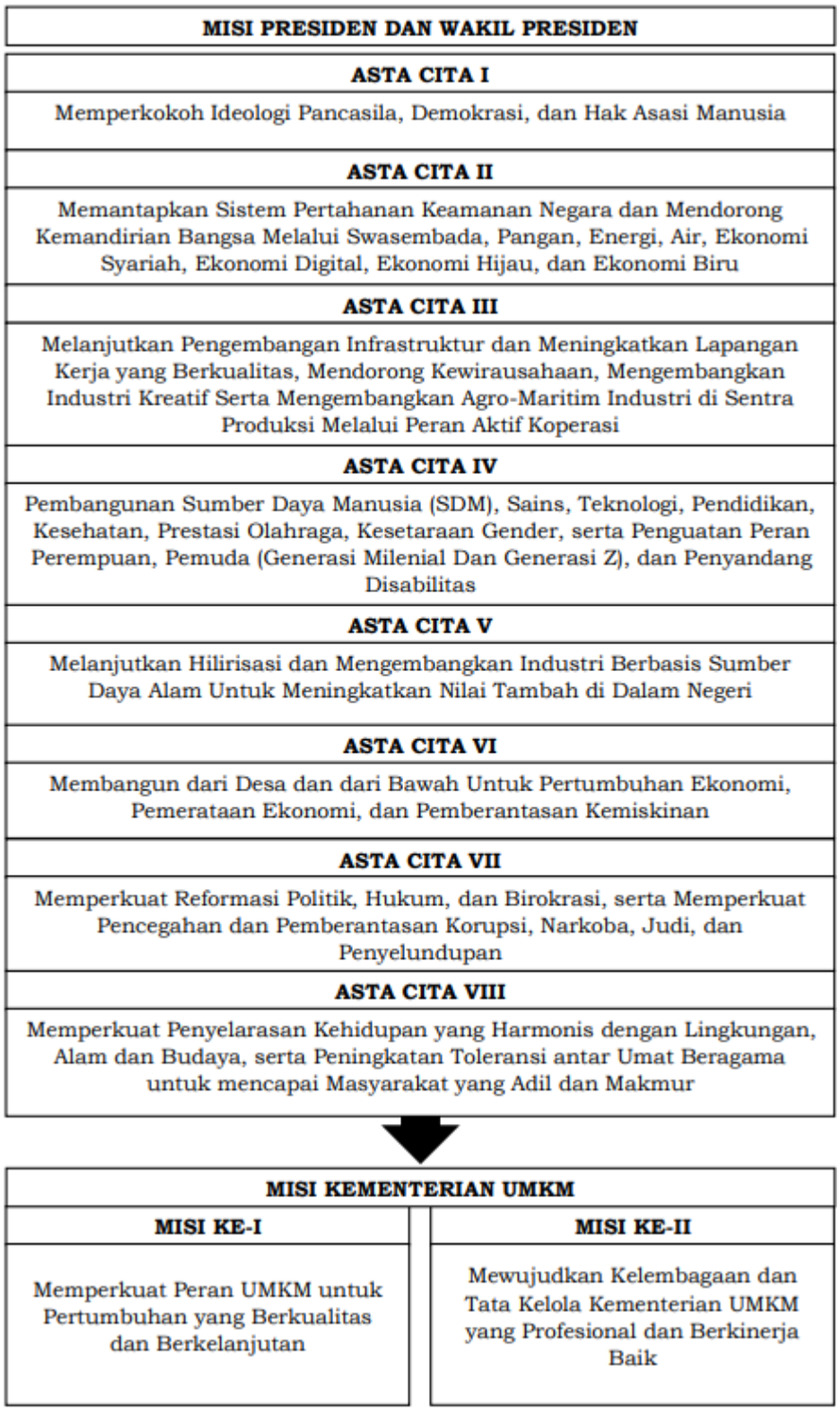

Sumber : Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas ditetapkan tujuan, sasaran startegis dan arah kebijakan Kementerian UMKM sebagai berikut :

Gambar 2.23
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Kementerian UMKM Tahun 2025 - 2029

VISI KEMENTERIAN UMKM
Terwujudnya UMKM Naik Kelas Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

MISI KE-I	MISI KE-II
Memperkuat Peran UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Mewujudkan Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik

AGENDA TUJUAN KE-1	AGENDA TUJUAN KE-2
Terwujudnya Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Terbentuknya Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik (*Good Governance*)

SASARAN STRATEGIS KE-1	SASARAN STRATEGIS KE-2
Penguatan UMKM Naik Kelas	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Berkualitas dan Akuntabel

ARAH KEBIJAKAN
Agenda: Transformasi UMKM melalui Kebijakan yang Tepat dalam Mendukung Perekonomian Nasional

Sumber : Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025 – 2029

d. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah **"Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"** yang dijabarkan dalam 6 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.

5. Menjaga stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia berkeadilan.
6. Menjaga Iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah telah menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB, dengan indikator Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran :

a. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, dengan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB.
b. Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi, dengan indikator Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi.
c. Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah, dengan indikator Rasio Kewirausahaan Daerah.
d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah, dengan indikator Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka Menegah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Propinsi Jawa Tengah periode 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jateng Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	Sasaran 1.1	Strategi 1.1.1	Arah Kebijakan 1.1.1.1
Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Meningkatnya volume usaha Koperasi terhadap PDRB	Peningkatan jumlah Koperasi yang diawasi	Peningkatan kualitas satgas pengawas Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.1.2
			Penilaian kesehatan mandiri bagi Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.1.3
			Peningkatan kepatuhan Koperasi
		Strategi 1.1.2	Arah Kebijakan 1.1.2.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kualitas kelembagaan dan tata kelola Koperasi
		Strategi 1.1.3	Arah Kebijakan 1.1.3.1
		Peningkatan manajemen usaha Koperasi	Pemanfaatan Teknologi Dan Hasil Riset dalam Aktivitas Usaha
			Arah Kebijakan 1.1.3.2
			Peningkatan akses pembiayaan Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.3.3
			Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.3.4
			Fasilitasi kemitraan Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.3.5
			Penyusunan Data Potensi Usaha Koperasi Desa
			Arah Kebijakan 1.1.3.6
			Sosialisasi dan Pendampingan dengan Pengurus/Pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
			Arah Kebijakan 1.1.3.7
			Fasilitasi Akses Kerja Sama Hasil Usaha KDMP dengan Stakeholder
			Arah Kebijakan 1.1.3.8
			Peningkatan Produktivitas bagi Anggota KDMP
		Strategi 1.1.3	Arah Kebijakan 1.1.3.1
		Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan bagi Koperasi	Pelatihan kualitas SDM Koperasi
	Sasaran 1.2	Strategi 1.2.1	Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya Minat berwirausaha	Peningkatan ualitas SDM melalui pendidikan dan latihan bagi Wirausaha	Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru
		Strategi 1.2.2	Arah Kebijakan1.2.2.1
		Pemberdayaan UKM dan wirausaha	Pendampingan UKM dan wirausaha
		Strategi 1.2.3	Arah Kebijakan1.2.2.2
		Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan bagi UMKM dan wirausaha	Fasilitasi literasi Pembiayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Arah Kebijakan 1.2.2.3
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha
			Arah Kebijakan 1.2.2.4
			Fasilitasi peningkatan daya saing UMKM
			Arah Kebijakan 1.2.3.1
			Pelatihan bagi UMKM dan wirausaha
	Sasaran 1.3	Strategi 1.3.1	Arah Kebijakan 1.3.1.1
	Meningkatnya UMKM non pertanian	Peningkatan kapasitas produksi dan perluasan akses pemasaran	Fasilitasi peningkatan kapasitas produksi dan akses pemasaran
		Strategi 1.3.2	Arah Kebijakan 1.3.2.1
		Peningkatan pemahaman literasi hukum	Fasilitasi pendampingan dan konsultasi hukum
Tujuan 2	Sasaran 2.1	Strategi 2.1.1	Arah Kebijakan 2.1.1.1
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Koordinasi penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
	Sasaran 2.2	Strategi 2.1.1	Arah Kebijakan 2.1.1.1
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah

Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jateng tahun 2025-2029

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan

kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah terkait *dengan "Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah".* Adapun Tema Isu KLHS yang terkait dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang antara lain sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 2.13
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi Unggulan terhadap beberlanjutan ekonomi daerah	1. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan
	2. Masih kurangnya konsribusi sektor terhadap kesejahteraan
	3. Belum optimalnya dukungan sektor keuangan
	4. Masih kurangnya dukungan industri hijau

Upaya pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan pemerintah, seperti pengembangan UMKM dan sektor pariwisata, belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian Kota Semarang. Pada Skala UMKM masih didominasi skala mikro sehingga memiliki kapasitas yang rendah dan sangat rentan terhadap guncangan. Kondisi ini menyebabkan UMKM di Kota Semarang sulit untuk berkembang dan bersaing dengan pengusaha besar. Rasio kewirausahaan daerah Kota Semarang juga masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 3,34%, sedangkan di negara maju dapat mencapai 10 – 12% dari total penduduk. Pengembangan ekonomi lokal, khususnya sektor ekonomi kreatif dapat menjadi solusi yang kolaboratif dan menjadi daya dorong bagi perekonomian kota. Jika tidak menjadi perhatian khusus, dikhawatirkan UMKM dan pariwisata di Kota Semarang akan terus tertinggal dan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan

Potensi ekonomi Kota Semarang yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya melalui pengembangan ekonomi lokal melalui potensi wisata kuliner di Semarang didominasi oleh makanan khas Semarang seperti lumpia, tahu gimbal, dan babat gongso. Berikut merupakan kondisi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang:

a. Pengembangan dan pengoptimalan konsep wisata MICE (Meeting, Incentive, Covention dan Exhibition) akan menjadi daya ungkit bagi komponen-komponen ekonomi lain yang tentunya disertai dengan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi, dan ketersediaan supply bahan baku pada sektor ekonomi kreatif;
b. Pengembangan UMKM masih perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Semarang. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM akan berpengaruh besar terhadap sisi produktivitas, kualitas serta manajemen pengelolaan khususnya pemasaran;

c. Jumlah pelaku usaha terampil masih rendah dikarenakan fasilitasi pembinaan tenaga kerja serta ketersediaan lembaga kursus latihan rujukan masih minim.

Adapun dari 196 Indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sesuai KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029, yang relevan dengan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
Pilar Ekonomi									
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	8,5	9	9,5	10	10,5	Tercapai	1.	Meningkatkan Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM
								2.	Meningkatkan Fasilitasi kemitraan usaha di bidang pembiayaan
								3.	Meningkatkan Kualitas produksi dan usaha UMKM
								4.	Menyiapkan Pelaku usaha yang feasibility dan bankable

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Koperasi, Renstra Kementerian UMKM, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2.15
Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lokasi Kota Semarang yang berada di Tengah tengah Pulau Jawa dan menjadi hub bagi daerah lain. - Kota Semarang sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). - Pengembangan padi biosalin, padi yang dapat ditanam pada tanah dengan kadar garam tinggi atau air payau. - Kota Semarang memiliki kawasan permukiman bersejarah yang lengkap dan unik, seperti Kauman, Kampung Melayu, Pecinan, dan kawasan Kota Lama.	Belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Kota Semarang	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi Unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Perkembangan Teknologi (Digitalisasi usaha pada UMKM dan koperasi dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha	Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil	Peningkatan Produktivitas dan Kualitas UMKM
	Belum optimalnya kelembagaan dan usaha koperasi		Geo ekonomi	Geo Politik dan Geoekonomi		
	Kurangnya daya saing produk Usaha Mikro					
	Keterbatasan Akses Pemasaran dan Kurangnya Pemanfaatan Digitalisasi					
	Belum optimalnya kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Koperasi dan UKM. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, telah dilakukan telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung strategi yaitu **“Peningkatan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan dan iklim berusaha“** dan arah kebijakan Kota Semarang dalam hal **“Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dan Industri Kreatif”.**

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah “pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota”. Adapun visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari**

dan Inklusif", dimana hal ini dicapai melalui pembangunan Kota Semarang agar menjadi semakin hebat.

Adapun tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan indikator tujuan yaitu "**Rasio Kewirausahaan Daerah"** yang diukur dengan membandingkan jumlah wirausaha (pemula dan mapan) dengan jumlah angkatan kerja di daerah tersebut. Rumusnya: (Jumlah Wirausaha/Jumlah Angkatan Kerja) x 100%.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan Menengah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1) Meningkatnya koperasi aktif dan sehat
   Dengan indikator sasaran **"Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDRB"**
   Indikator ini diukur dari rasio yang menunjukkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara. Rumusnya adalah (Volume usaha koperasi / PDRB) x 100. Volume usaha koperasi di sini adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa koperasi dalam suatu periode tertentu.

2) Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas
   Dengan indikator sasaran **"Persentase usaha Mikro yang naik kelas"**. Indikator ini diukur dengan membandingkan (Pelaku usaha mikro yang dibina tahun N yang naik kelas dengan Jumlah Usaha Mikro Tahun N) x 100%.

3) Meningkatnya kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
   Dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu :
   1) "**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang"**

Indikator ini diukur dari hasil penilaian terhadap AKIP (Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja

2) **"Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang"**
Indikator ini diukur dari penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang dilakukan dengan cara pengisian kuesioner atau survei melalui kanal ASIKMAS yang terdiri dari 9 unsur yaitu :
   1. Persyaratan layanan – kemudahan, kejelasan, dan kelengkapan informasi persyaratan.
   2. Prosedur layanan – kejelasan alur proses pelayanan.
   3. Waktu penyelesaian – ketepatan waktu sesuai dengan yang dijanjikan.
   4. Biaya/tarif layanan – kewajaran dan keterbukaan informasi mengenai biaya.
   5. Produk layanan – kesesuaian antara hasil pelayanan dengan yang dijanjikan.
   6. Kompetensi petugas – kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan.
   7. Perilaku petugas – sikap sopan dan ramah petugas dalam memberikan pelayanan.
   8. Sarana dan prasarana – kelayakan fasilitas dan kenyamanan tempat pelayanan.
   9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan – kemudahan menyampaikan pengaduan serta respons yang diberikan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif		Rasio Kewirausahaan Daerah	3,44%	3,52%	3,59%	3,67%	3,74%	3,81%	
2. Meningkatnya akses lapangan kerja										
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,84%	1,86%	1,90%	1,97%	2,02%	2,04%	
		Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,62%	2,11%	2,59%	3,08%	3,57%	4,05%	
		Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80,35	80,37	80,39	80,41	80,43	80,45	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	98,50	98,51	98,52	98,53	98,54	98,55	

3.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah. Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk menjawab permasalahan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro serta responsive terhadap pemberdayaan masyarakat rentan dan kesetaraan gender.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi Pemerintah Kota Semarang dan tujuan dan sasaran dinas yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 ke dalam program-program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan berisi rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Dinas Koperasi dan Usaha MIkro Kota Semarang dengan efektif dan efisien.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan produktivitas serta daya saing Koperasi dan UMKM melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola, penguatan jiwa wirausaha, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan berorientasi pada sumber daya lokal serta ramah lingkungan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, perluasan akses pemasaran dan Fasilitasi literasi Pembiayaan	Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM melalui formalisasi usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola, penumbuhan jiwa wirausaha, standarisasi produk, peningkatan kualitas SDM serta Fasilitasi literasi Pembiayaan dan Perluasan Akses Pasar	Penguatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan tata kelola Koperasi dan implementasi manajemen usaha modern pada UMKM, pemantapan jiwa wirausaha, digitalisasi usaha, serta peningkatan kualitas SDM Fasilitasi literasi Pembiayaan, dan Perluasan Akses Pasar	Pemantapan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM melalui penguatan tata kelola Koperasi dan UMKM, peningkatan nilai tambah lewat diversifikasi produk dan digitalisasi usaha, serta penguatan kualitas SDM Fasilitasi literasi Pembiayaan, dan Perluasan Akses Pasar	Perwujudan Koperasi dan UMKM yang produktif, mandiri, tangguh, dan berdaya saing

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dengan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital.	Peningkatan Kepatuhan Koperasi berdasarkan regulasi perkoperasian	
			Peningkatan Penilaian Kesehatan mandiri bagi koperasi	
2.	Meningkatnya akses lapangan kerja		Peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pengelola/pengurus koperasi termasuk KKMP	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
		2. Peningkatan ekosistem kewirausahaan melalui inkubasi bisnis dan kemitraan strategis. 3. Pengembangan industri halal dan UMKM halal.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perkoperasian	
			Peningkatan Kualitas kelembagaan dan tata kelola Koperasi termasuk KKMP	
			Peningkatan Jaringan Pemasaran Koperasi dan Kemitraan Koperasi dengan Stakeholder	
			Peningkatan akses pembiayaan Koperasi	
			Optimalisasi kemitraan Usaha Mikro	
			Peningkatan fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro	
			Peningkatan produktivitas Usaha mikro	
			Peningkatan literasi pembiayaan (Feasible dan Bankable)	
			Peningkatan standarisasi produk usaha mikro	
			Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro serta kewirausahaan	
			Peningkatan kapasitas produksi dan akses pemasaran	
			Peningkatan strategi pemasaran melalui platform digital	
			Peningkatan capaian Kinerja Perangkat Daerah	
			Peningkatan kualitas Pelayanan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pendapatan masyarakat **Meningkatnya akses lapangan kerja**	**Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif**				**Rasio Kewirausahaan Daerah**		
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat			**Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**		
			Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi		**Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian**	**Program : PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persen**
				1. Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan koperasi	1. Persentase koperasi yang diawasi 2. Persentase koperasi yang diperiksa	Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		**Persentase koperasi sehat**	**Program : PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persen**
				Meningkatnya pengelolaan koperasi yang sehat sesuai regulasi yang berlaku	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha
			Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten		**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan**	**Program : PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persen**

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Orang
			Meningkatnya pemberdayaan koperasi		**Persentase koperasi yang berkualitas**	**Program : PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persen**
				1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi 2. Meningkatnya volume usaha koperasi	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi 2. Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kelompok masyarakat

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit usaha
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Sub Kegiatan : Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas			**Persentase Usaha Mikro yang naik kelas**		**Persen**
			Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing		**Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)**	**Program : PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persen**
				1. Meningkatnya keberdayaan usaha mikro melalui Fasilitasi Kemitraan Usaha 2. Meningkatnya Kualitas dan standarisasi Produk usaha mikro serta optimalnya fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro 3. Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, Kapasitas, Kompetensi, SDM Pelaku Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan 4. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	1. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi kemitraan usaha 2. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan 3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha 4. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Sub Kegiatan : Pemulihan Usaha Mikro	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Unit Usaha
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya daya saing usaha mikro		**Persentase pelaku usaha mikro yang dibina dan meningkat omsetnya**	**Program : PENGEMBANGAN UMKM**	**Peren**
				1. Optimalnya inkubasi usaha mikro berbasis sektor unggulan atau klaster lokal 2. Meningkatnya omset Pelaku usaha Mikro yang dibina melalui perluasan akses pemasaran 3. Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk pemasaran produk 4. Meningkatnya nilai jual usaha mikro melalui kemasan yang lebih berkualitas	1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet 2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet 3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet 4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persen
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Unit Usaha

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha
		Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			**1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**		**Nilai**
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**Persentase perencanaan serta pelaporan Kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang berkualitas**	**Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persen**
				Tersedianya acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta Pelaporan Kinerja yang sesuai Peraturan Perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan Perundangan	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan Keuangan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan Keuangan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan perundangan	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
		Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			**2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang		**Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**	**Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persen**

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Nilai Layanan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sapras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase Kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan Sapras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sapras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai ketentuan	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET/ SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit

Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu :

1) Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif.
2) Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas.
3) Mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
4) Penguatan peran koperasi terhadap perekonomian.
5) Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
6) Mendorong kepesertaan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.
7) Pelatihan UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM.
8) Peningkatan kepesertaan UMKM dan Industri Kreatif dalam kegiatan promosi.

Bentuk dukungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap program prioritas kepala daerah tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran RPJMD : Meningkatnya pendapatan masyarakat				
1.	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) **Kegiatan :** Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan **Sub Kegiatan :** 1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 4. Pemulihan Usaha Mikro 5. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro 6. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan.	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)
2.	Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas.	Meningkatnya daya saing usaha mikro	Program Pengembangan UMKM **Kegiatan :** Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil **Sub Kegiatan :** 1. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro 2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina dan meningkat omsetnya

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.	Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi **Kegiatan :** Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian
4.	Penguatan peran koperasi terhadap perekonomian. Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.	Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi **Kegiatan :** Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** 3. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 4. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 6. Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkualitas
5.	Mendorong kepesertaan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi **Kegiatan :** Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi sehat
Sasaran RPJMD : Meningkatnya akses lapangan kerja				
6.	Pelatihan UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) **Kegiatan :** Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan **Sub Kegiatan :**	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 4. Pemulihan Usaha Mikro 5. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro 6. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
7.	Peningkatan kepesertaan UMKM dan Industri Kreatif dalam kegiatan promosi	Meningkatnya daya saing usaha mikro	Program Pengembangan UMKM **Kegiatan :** Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil **Sub Kegiatan :** 1. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro 2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya daya saing usaha mikro

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH													
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													
Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	**Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian**	**50%**	**55%**	**506.488.503**	**61%**	**560.072.771**	**62%**	**583.395.138**	**63%**	**587.679.126**	**64%**	**597.784.165**	
Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	**1. Persentase koperasi yang diawasi**	**N/A**	**23%**	**294.684.220**	**25%**	**325.860.521**	**26%**	**339.429.898**	**26%**	**341.922.401**	**27%**	**347.801.696**	
	2. Persentase koperasi yang diperiksa	**N/A**	**32%**	**211.804.283**	**36%**	**234.212.250**	**36%**	**243.965.240**	**37%**	**245.756.725**	**37%**	**249.982.469**	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250	134	294.684.220	135	325.860.521	136	339.429.898	137	341.922.401	138	347.801.696	
			184	211.804.283	185	234.212.250	186	243.965.240	187	245.756.725	188	249.982.469	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP													
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	**Persentase koperasi sehat**	**44%**	**44,1%**	**396.015.519**	**44,2%**	**437.912.228**	**44,3%**	**456.147.626**	**44,4%**	**459.497.210**	**44,5%**	**467.398.184**	
Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya**	**69,28 %**	**70%**	**396.015.519**	**70%**	**437.912.228**	**70%**	**456.147.626**	**70%**	**459.497.210**	**70%**	**467.398.184**	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	345	250	396.015.519	250	437.912.228	250	456.147.626	250	459.497.210	250	467.398.184	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													
Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan**	**41,30 %**	**41,35 %**	**604.287.223**	**41,40 %**	**668.218.167**	**41,45 %**	**696.043.890**	**41,50%**	**701.155.080**	**41,55%**	**713.211.318**	
Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SDM Koperasi yang kompeten**	**N/A**	**80%**	**604.287.223**	**80%**	**668.218.167**	**80%**	**696.043.890**	**80%**	**701.155.080**	**80%**	**713.211.318**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	580	560	604.287.223	560	668.218.167	560	696.043.890	560	701.155.080	560	713.211.318	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
Meningkatnya pemberdayaan koperasi	**Persentase koperasi yang berkualitas**	**59,72 %**	**59,74 %**	**2.101.350.498**	**59,75 %**	**2.323.664.187**	**59,76 %**	**2.420.425.453**	**59,77 %**	**2.438.199.122**	**59,78 %**	**2.480.123.528**	
Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi**	**N/A**	**1%**	**475.000.000**	**1%**	**475.000.000**	**1%**	**550.000.000**	**1%**	**550.000.000**	**1%**	**560.000.000**	
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 kelompok masyarakat	20 kelompok masy	475.000.000	20 kelompok masy	475.000.000	20 kelompok masy	550.000.000	20 kelompok masy	550.000.000	20 kelompok masy	560.000.000	
	2.Persentase peningkatan	**30,82 %**	**31%**	**1.626.350.498**	**31,5%**	**1.848.664.187**	**32%**	**1.870.425.453**	**32,5%**	**1.888.199.122**	**33%**	**1.920.123.528**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	volume usaha koperasi												
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	30	120	300.000.000	120	350.000.000	120	350.000.000	120	350.000.000	120	365.000.000	
Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500	500	1.226.350.498	500	1.388.664.187	500	1.400.425.453	500	1.413.199.122	500	1.425.123.528	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	37	50	100.000.000	50	110.000.000	50	120.000.000	50	125.000.000	50	130.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	**Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)**	**63%**	**67%**	**6.484.300.570**	**69%**	**7.170.311.202**	**71%**	**7.468.894.960**	**73%**	**7.523.740.554**	**75%**	**7.653.109.951**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha**	**N/A**	**26%**	**800.000.000**	**28%**	**850.000.000**	**30%**	**875.000.000**	**32%**	**877.000.000**	**34%**	**900.000.000**	
	2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	**N/A**	**25%**	**200.000.000**	**26%**	**225.000.000**	**27%**	**230.000.000**	**28%**	**235.000.000**	**29%**	**250.000.000**	
	3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	**N/A**	**71,40 %**	**2.484.300.570**	**73,40 %**	**2.845.311.202**	**74%**	**3.063.894.960**	**76,50 %**	**3.095.000.000**	**81%**	**3.160.000.000**	
	4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha	**N/A**	**55%**	**3.000.000.000**	**60%**	**3.250.000.000**	**65%**	**3.300.000.000**	**73%**	**3.316.740.554**	**78%**	**3.343.109.951**	
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200	225	800.000.000	250	850.000.000	270	875.000.000	280	877.000.000	300	900.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	N/A	200	200.000.000	200	225.000.000	200	230.000.000	200	235.000.000	200	250.000.000	
Sub Kegiaan :	Jumlah Unit Usaha yang Telah	120	180	784.300.570	180	895.311.202	180	903.894.960	210	905.000.000	210	930.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro												
Sub Kegiatan : Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500	500	425.000.000	500	450.000.000	550	510.000.000	550	515.000.000	550	525.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300	300	1.275.000.000	300	1.500.000.000	350	1.650.000.000	350	1.675.000.000	350	1.705.000.000	
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1260	1570	3.000.000.000	1600	3.250.000.000	1635	3.300.000.000	1650	3.316.740.554	1675	3.343.109.951	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
Meningkatnya daya saing usaha mikro	**Persentase pelaku usaha mikro yang dibina dan meningkat omsetnya**	**N/A**	**20%**	**3.822.403.681**	**26%**	**4.226.797.268**	**27%**	**4.402.808.180**	**28%**	**4.435.138.884**	**30%**	**4.511.400.318**	
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet**	**N/A**	**25%**	**400.000.000**	**26%**	**425.000.000**	**27%**	**450.000.000**	**28%**	**475.000.000**	**29%**	**500.000.000**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	**N/A**	**30%**	**2.372.403.681**	**32%**	**2.706.797.268**	**34%**	**2.787.808.180**	**35%**	**2.770.138.884**	**37%**	**2.781.400.318**	
	3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	**N/A**	**25%**	**200.000.000**	**27%**	**220.000.000**	**29%**	**265.000.000**	**32%**	**280.000.000**	**35%**	**310.000.000**	
	4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	**N/A**	**20%**	**850.000.000**	**22%**	**875.000.000**	**24%**	**900.000.000**	**26%**	**910.000.000**	**28%**	**920.000.000**	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	N/A	100	400.000.000	105	425.000.000	110	450.000.000	115	475.000.000	120	500.000.000	
Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	700	700	3.422.403.681	750	3.801.797.268	800	3.952.808.180	850	3.960.138.884	900	4.011.400.318	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota semarang yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**11.472.164.307**	**100%**	**12.052.046.392**	**100%**	**12.641.640.977**	**100%**	**13.264.363.736**	**100%**	**13.935.169.988**	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota semarang yang sesuai Peraturan Perundangan**	**100%**	**100%**	**34.677.200**	**100%**	**45.600.000**	**100%**	**46.050.000**	**100%**	**56.050.000**	**100%**	**82.600.000**	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3.000.000	3	3.500.000	3	3.700.000	5	3.700.000	3	30.000.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
Sub Kegiatan :	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	850.000	1	850.000	1	850.000	1	850.000	1	850.000	
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	2.077.200	3	2.500.000	3	2.750.000	3	2.750.000	3	3.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan**	**100%**	**100%**	**11.430.599.707**	**100%**	**11.993.609.692**	**100%**	**12.584.542.177**	**100%**	**13.204.787.036**	**100%**	**13.850.683.888**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan												
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	74	11.158.999.707	74	11.716.949.692	74	12.302.797.177	74	12.917.937.036	74	13.563.833.888	
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	270.000.000	12	275.000.000	12	280.000.000	12	285.000.000	12	285.000.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	500.000	1	510.000	1	520.000	1	550.000	1	550.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	2	2	600.000	2	600.000	2	625.000	2	650.000	2	650.000	
Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	NA	1	500.000	1	550.000	1	600.000	1	650.000	1	650.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**89,5%**	**90%**	**1.261.791.474**	**90,5%**	**2.125.144.579**	**90,75 %**	**2.163.713.127**	**91%**	**1.656.375.009**	**91,25 %**	**1.257.737.231**	
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**	**NA**	**80**	**30.000.000**	**80,5**	**50.000.000**	**81**	**50.000.000**	**81,5**	**55.000.000**	**82**	**60.000.000**	
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	50	25.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	45.000.000	50	45.000.000	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**	**100%**	**100%**	**306.887.400**	**100%**	**585.000.000**	**100%**	**674.761.927**	**100%**	**408.526.700**	**100%**	**391.886.100**	
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	20	25.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	
Sub Kegiatan :	Jumlah Paket Barang Cetakan	3	5	21.887.400	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan												
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	60.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	150.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	200.000.000	12	170.000.000	
Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2	50.000.000	2	200.000.000	2	239.761.927	2	73.526.700	2	86.886.100	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota semarang**	**100%**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**242.981.279**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**30.000.000**	
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2	50.000.000	4	242.981.279	3	150.000.000	2	60.000.000	2	30.000.000	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan**	**100%**	**100%**	**530.791.474**	**100%**	**660.000.000**	**100%**	**665.000.000**	**100%**	**671.375.009**	**100%**	**387.737.231**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti												
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	110.000.000	12	160.000.000	12	165.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12	420.791.474	12	500.000.000	12	500.000.000	12	501.375.009	12	217.737.231	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**	**351.000.000**	**100%**	**600.000.000**	**100%**	**635.000.000**	**100%**	**465.000.000**	**100%**	**390.000.000**	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	36.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kendaraan Dinas Jabatan													
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	29	200.000.000	29	300.000.000	29	325.000.000	29	210.000.000	29	230.000.000	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	20	40.000.000	20	60.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	N/A	2	75.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	145.000.000	2	50.000.000	

1.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,44	3,52	3,59	3,67	3,74	3,81	
2.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	61,98	64,23	66,49	68,74	71,00	73,25	
3.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	17,52	17,64	17,75	17,87	17,99	18,11	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Koperasi Aktif	%	77,82	78,05	78,29	78,52	78,76	78,99	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	17,52	17,64	17,75	17,87	17,99	18,11	
3.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	61,98	64,23	66,49	68,74	71,00	73,25	
4.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Angka	7.500	8.500	9.500	10.500	11.500	12.500	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Terkait hal tersebut, saat penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 dokumen Renstra Tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Maka Renja disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029, serta RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD disusun dengan mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 periode pertama, serta memperhatikan Visi, Misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2025-2030. Adapun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 tersebut akan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan serta sub kegiatan, agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Seluruh personil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
c. Untuk penjabaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 lebih lanjut, akan disusun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara berkesinambungan; yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang penanaman modal, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang

konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6616);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 12 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1039);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1209);
21. Peraturan Kementerian Investasi / BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
22. Peraturan Kementerian Investasi / BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
23. Peraturan Kementerian Investasi / BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

24. Peraturan Kementerian Investasi / BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Indikator Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

37. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
38. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
42. Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang penanaman mosal yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pemban pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu. Fungsi utama perangkat daerah ini adalah memberikan kemudahan, kepastian, serta transparansi dalam pelayanan publik di bidang investasi dan perizinan, sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi Kota Semarang.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Semarang meliputi:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. Program Promosi Penanaman Modal,
3. Program Pelayanan Penanaman Modal,
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan
6. PrograM Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan, dan UPTD;
d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

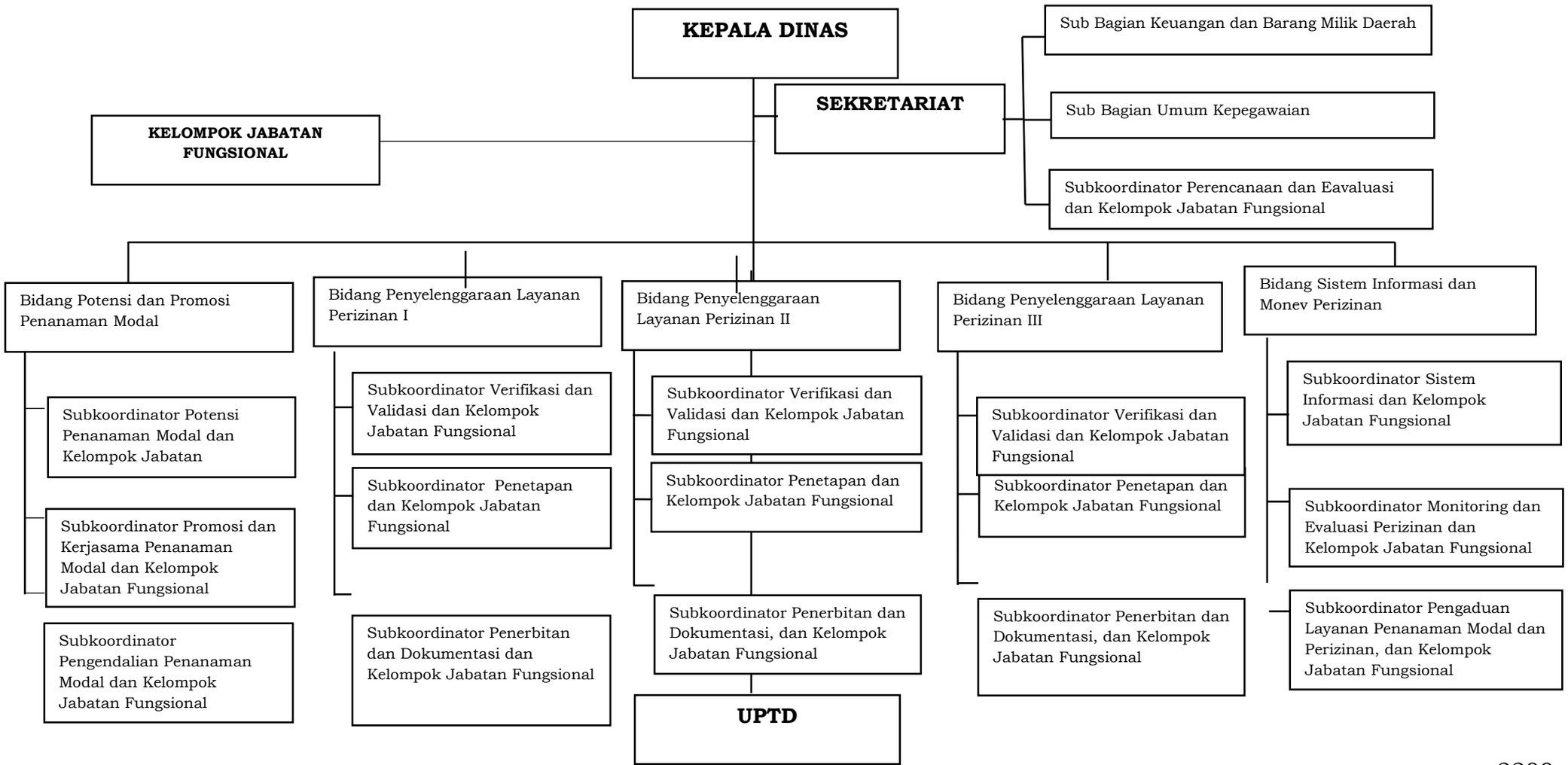

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

   Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD. Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

   a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
   d. pelaksanaan fasilitasi tugastugas bidang potensi dan promosi penanaman modal Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
   e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Dinas;
   g. pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Dinas;
   h. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
   i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
   j. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;

k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
m. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
n. pelaksaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
p. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya dinas;
r. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
s. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
t. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
v. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
w. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
x. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas;
y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
z. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal

Kepala Bidang Potensi Dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas terkait Potensi Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, dan Pengendalian Penanaman Modal, mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
e. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan identifikasi potensi penanaman modal;
f. Pelaksanaan kegiatan analisis dan kebijakan potensi penanaman modal;

g. pelaksanaan kegiatan publikasi potensi penanaman modal;
h. pelaksanaan kegiatan penyusunan peta tematik potensi penanaman modal;
i. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan publikasi kegiatan promosi penanaman modal melalui media informasi;
j. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pameran penanaman modal;
k. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan temu bisnis;
l. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kemitraan penanaman modal;
m. pelaksanaan kegiatan pendataan rencana penanaman modal meliputi ijin penanaman modal dan ijin usaha;
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan rencana penanaman modal;
o. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
p. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kebijakan fasilitas penanaman modal;
q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal; dan
t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I

Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Verifikasi dan validasi layanan perizinan I, penetapan layanan perizinan I dan penerbitan dan dokumentasi layanan perizinan I, serta mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran:
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
g. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
h. pelaksanaan kegiatan pendaftaran perizinan Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
i. pelaksanaan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
j. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
k. pelaksanaan kegiatan entri data perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;

l. pelaksanaan kegiatan perhitungan biaya retribusi pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
m. pelaksanaan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
n. pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
p. pelaksanaan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
q. pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan revisi/perubahan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
r. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
s. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang penyelenggaraan layaanan perizinan I;
t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I; dan
u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II

Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Verifikasi Dan Validasi Layanan Perizinan II, Penetapan Layanan Perizinan II dan Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II, serta mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II; pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
g. pelaksanaan kegiatan pendaftaran perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
h. pelaksanaan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
i. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
j. pelaksanaan kegiatan entri data perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
k. pelaksanaan kegiatan perhitungan biaya retribusi pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
l. pelaksanaan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;

m. pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II
n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
o. pelaksanaan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
p. pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan revisi/perubahan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II; dan
t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III

Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III, Penetapan Layanan Perizinan III dan Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III., serta mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
g. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen bidang penyelenggaraan layanan perizinan III;
h. pelaksanaan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
i. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
j. pelaksanaan kegiatan entri data perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
k. pelaksanaan kegiatan perhitungan biaya retribusi pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
l. pelaksanaan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
m. pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
o. pelaksanaan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;

p. pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan revisi atau perubahan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III; dan
t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan

Kepala Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi perizinan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan, dan Pengaduan Layanan Penanaman Moodal dan Perizinan, serta mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perizinan;
f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Website dan Portal;
g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan integrasi;
h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hardware dan jaringan;
i. pelaksanaan kegiatan monitoring kendali proses pelayanan perizinan;
j. pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
k. pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan dan harmonisasi kebijakan pelayanan perizinan;
m. pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan;
n. pelaksanaan kegiatan fasilitasi sengketa perizinan;
o. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para

pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Semarang diklasifikasikan ke dalam data kepegawaian dalam tabel 2.1. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	11	5	2	1	19
2	D3	3	1	-	-	4
3	S1/D4	14	22	2		38
4	S2	3	5	-	-	8
5	S3	-	-	-	-	-

Dari jumlah pegawai sebanyak 69(enam puluh sembilan) orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025

No.	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan II	7	1	8
2	Golongan III	11	16	27
3	Golongan IV	2	3	5

a. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Aset Tanah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
						N I H I L					

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				N I H I L				

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan DPMPTSP Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan penanaman modal yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DPMPTSP Kota Semarang

Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.Indikator Tujuan dan Sasaran																			
Tujuan :																			
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	%			N/A	N/A	10%	7%	7%	40,21%	3,09%	10,24%	10,31%	10,03%	N/A	N/A	102,40 %	147,29 %	143,29 %
Sasaran :																			
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Dalam Juta			20.543	21.924.000	24.086.799	25.684.059	27.362.089	21.842.472	22.538.063	24.662.472	27.205.700	28.261.147	106325,62%	102,80 %	102,39 %	105,92 %	103,29 %
Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Izin Terbit sesuai Standar Pelayanan	%			98%	99%	95%	95%	95,5%	98,70%	99,33%	95,63%	95,69%	96,71%	100,71%	100,33 %	100,66 %	100,73 %	101,27 %
2. Indikator Kinerja Kunci																			

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	%			N/A	N/A	10%	7%	7%	40,21%	3,09%	10,24%	10,31%	10,03%	N/A	N/A	102,40 %	147,29 %	143,29 %
3. Indikator SPM																			
-																			
4. Indikator TPB																			
-																			

Kinerja DPMPTSP Kota Semarang periode 2020–2024 secara konsisten menunjukkan hasil yang melampaui target Renstra, baik pada aspek pertumbuhan maupun nilai realisasi investasi serta kualitas pelayanan perizinan. Target pertumbuhan investasi sebesar 7–10% tercapai dengan realisasi 10,24% pada 2022, 10,31% pada 2023, dan 10,03% pada 2024, sementara nilai investasi berhasil meningkat signifikan hingga Rp28,26 triliun pada 2024 dengan rasio capaian di atas 100% setiap tahun. Di sisi pelayanan publik, persentase izin terbit sesuai standar pelayanan juga selalu melampaui target dengan capaian rata-rata di atas 100%, mencerminkan kualitas layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Capaian ini menegaskan peran DPMPTSP tidak hanya sebagai penggerak investasi daerah, tetapi juga sebagai garda depan reformasi birokrasi pelayanan publik di Kota Semarang.

Kinerja DPMPTSP Kota Semarang tidak hanya berfokus pada pencapaian target investasi dan kualitas pelayanan perizinan, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap agenda lintas sektoral, khususnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kota Layak Anak (KLA). Anggaran Responsif Gender (ARG) di DPMPTSP Kota Semarang. Seluruh program dan kegiatan DPMPTSP Kota Semarang pada dasarnya memiliki kontribusi terhadap penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) karena diarahkan untuk memberikan akses pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Pelayanan perizinan yang diselenggarakan secara transparan, cepat, dan inklusif baik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), Fasilitasi secara langsung, maupun layanan digital, DPMPTSP memastikan bahwa akses terhadap layanan perizinan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip PUG yang menekankan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.

Selain itu, DPMPTSP juga mendukung terwujudnya Kota Layak Anak melalui penyediaan sarana pelayanan ramah anak dan ramah keluarga di MPP, seperti area bermain, ruang laktasi, dan ruang tunggu yang nyaman. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak atas kenyamanan, perlindungan, dan partisipasi dalam ruang publik. Dengan demikian, kinerja DPMPTSP dalam penyediaan layanan perizinan yang responsif gender dan ramah anak turut memperkuat pencapaian visi Kota Semarang sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Taerpadu Satu Pintu	2.191.286.000	15.543.074.645	23.006.116.324	23.710.676.542	24.528.689.422	2.188.884.320	13.918.781.006	20.717.788.539	21.620.679.954	22.943.391.901	99,89%	89,55%	90,05%	91,19%	93,54%	18,18%	19,77%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	N/A	12.220.917.268	18.573.505.264	15.501.133.195	12.668.232.286	N/A	11.260.401.266	16.675.816.352	14.289.632.943	12.132.644.549	N/A	92,14%	89,78%	92,18%	95,77%	5,72%	6,23%
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi	N/A	25.897.865	5.500.000	13.618.180	64.172.900	N/A	12.179.600	4.518.150	13.553.380	62.732.756	N/A	47,03%	82,15%	99,52%	97,76%	146,69%	166,64%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	10.180.856.730	8.154.564.344	8.128.490.517	7.200.870.000	N/A	9.923.536.025	7.961.633.540	7.674.667.798	7.041.518.567	N/A	97,47%	97,63%	94,42%	97,79%	-10,54%	-10,54%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	32.400.000	31.006.350	62.952.000	190.886.320	N/A	27.882.000	30.000.000	60.900.000	184.386.000	N/A	86,06%	96,75%	96,74%	96,59%	100,65%	104,45%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	1.414.766.129	9.002.961.505	5.051.090.748	2.673.096.695	N/A	948.910.207	7.828.676.153	4.462.951.969	2.377.324.557	N/A	67,07%	86,96%	88,36%	88,94%	148,46%	211,76%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	88.925.000	902.900.065	1.555.298.240	1.710.645.081	N/A	80.672.458	542.158.863	1.522.812.300	1.701.012.121	N/A	90,72%	60,05%	97,91%	99,44%	332,53%	254,88%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	478.071.544	476.573.000	689.683.510	828.561.290	N/A	267.220.976	308.829.646	554.747.496	765.670.548	N/A	55,90%	64,80%	80,44%	92,41%	21,51%	44,41%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	N/A	871.806.250	1.407.492.000	1.665.446.626	891.119.196	N/A	799.151.420	1.312.406.820	1.502.084.757	841.752.772	N/A	91,67%	93,24%	90,19%	94,46%	11,09%	11,57%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	635.246.336	1.059.800.000	903.961.203	541.119.196	N/A	576.654.878	1.006.111.970	872.421.077	521.275.188	N/A	90,78%	94,93%	96,51%	96,33%	4,00%	6,98%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	N/A	236.559.914	347.692.000	761.485.423	350.000.000	N/A	222.496.542	306.294.850	629.663.680	320.477.584	N/A	94,06%	88,09%	82,69%	91,57%	37,32%	31,38%
Program Promosi Penanaman Modal	N/A	470.355.141	830.000.000	1.830.917.151	1.317.556.175	N/A	432.334.781	746.388.605	1.492.389.088	1.277.984.012	N/A	91,92%	89,93%	81,51%	97,00%	56,34%	52,74%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	470.355.141	830.000.000	1.830.917.151	1.317.556.175	N/A	432.334.781	746.388.605	1.492.389.088	1.277.984.012	N/A	91,92%	89,93%	81,51%	97,00%	56,34%	52,74%
Program Pelayanan Penanaman Modal	N/A	901.945.076	1.097.305.000	3.300.692.269	8.176.346.302	N/A	840.044.746	1.016.435.046	3.067.270.093	7.367.806.232	N/A	93,14%	92,63%	92,93%	90,11%	123,39%	120,99%
Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	901.945.076	1.097.305.000	3.300.692.269	8.176.346.302	N/A	840.044.746	1.016.435.046	3.067.270.093	7.367.806.232	N/A	93,14%	92,63%	92,93%	90,11%	123,39%	120,99%
Program Pengendalian Pelaksanaan	N/A	499.766.728	540.314.060	561.960.573	656.818.000	N/A	333.830.650	510.615.200	432.305.610	516.256.593	N/A	66,80%	94,50%	76,93%	78,60%	9,67%	19,01%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penanaman Modal																	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	499.766.728	540.314.060	561.960.573	656.818.000	N/A	333.830.650	510.615.200	432.305.610	516.256.593	N/A	66,80%	94,50%	76,93%	78,60%	9,67%	19,01%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	N/A	578.284.181	557.500.000	850.526.728	372.045.000	N/A	523.018.234	456.126.516	836.997.463	258.682.110	N/A	90,44%	81,82%	98,41%	69,53%	-2,43%	0,54%
Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	N/A	578.284.181	557.500.000	850.526.728	818.617.463	N/A	523.018.234	456.126.516	836.997.463	806.947.743	N/A	90,44%	81,82%	98,41%	98,57%	15,07%	22,37%

c. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang optimal serta mendukung percepatan investasi di Kota Semarang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai mitra Perangkat Daerah (PD) yang memiliki peran strategis dalam proses pelayanan. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat koordinasi teknis, tetapi juga mempercepat proses pelayanan sehingga dapat memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Adapun mitra PD yang berkontribusi dalam pemberian pelayanan tersebut antara lain:

1. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
   Merupakan mitra utama dalam hal kebijakan investasi nasional. DPMPTSP Kota Semarang terhubung langsung dengan sistem OSS (Online Single Submission) yang dikelola oleh BKPM. Kementerian ini juga memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta fasilitasi promosi investasi di tingkat pusat maupun internasional.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
   DPMPTSP bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam rangka integrasi data dan proses perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pertanahan. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat proses perizinan bangunan, penggunaan lahan, dan kesesuaian tata ruang.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
   Dinas ini merupakan mitra strategis yang membantu menyelaraskan kebijakan dan prosedur pelayanan perizinan yang berada di kewenangan provinsi. Kerja sama ini penting untuk memastikan adanya sinkronisasi regulasi dan percepatan layanan yang melibatkan tingkatan pemerintahan yang berbeda, khususnya terkait perizinan berusaha yang lintas daerah atau kewenangan provinsi.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
   Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pemberian izin lingkungan dan verifikasi dokumen lingkungan yang menjadi persyaratan utama dalam penerbitan izin usaha dan izin pembangunan. Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup menjamin bahwa proses perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan lingkungan yang berlaku sehingga pembangunan dan investasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Semarang
   Sebagai mitra dalam mendukung pelayanan izin di bidang perdagangan dan industri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan fasilitasi, pembinaan, serta pemantauan terhadap pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kota Semarang. Sinergi ini memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan dukungan yang menyeluruh mulai dari perizinan, pengembangan kapasitas, hingga pengawasan pasar.
6. Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang

Mengingat peran penting UMKM dalam perekonomian daerah, Dinas Koperasi dan UKM menjadi mitra vital dalam pemberian layanan perizinan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. DPMPTSP bekerja sama dengan dinas ini untuk menyederhanakan proses perizinan UMKM serta memberikan pendampingan dan pelatihan guna meningkatkan daya saing usaha.

7. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
   Dalam proses perizinan pembangunan dan tata ruang, Distaru memberikan rekomendasi teknis terkait penggunaan lahan, konstruksi bangunan, dan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang. Kerja sama ini sangat penting agar izin yang diterbitkan sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan standar teknis yang berlaku.
8. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang
   Satpol PP berperan dalam pengawasan dan penertiban pelaksanaan izin usaha, memastikan bahwa usaha yang beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan dan mematuhi peraturan daerah. Keberadaan Satpol PP membantu menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan izin sehingga mendukung iklim investasi yang sehat.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang
   BPBD dilibatkan dalam aspek keamanan dan mitigasi risiko dalam pemberian izin, terutama yang berkaitan dengan bangunan dan usaha yang memiliki potensi risiko bencana. Kerjasama ini memastikan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas dalam proses perizinan.
10. Dinas Kesehatan Kota Semarang
    Dalam perizinan yang berkaitan dengan sektor kesehatan dan kebersihan, Dinas Kesehatan berperan memberikan rekomendasi teknis dan pengawasan. Hal ini penting agar usaha atau fasilitas yang beroperasi dapat memenuhi standar kesehatan yang berlaku.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang
    Diskominfo berkontribusi dalam penyediaan sistem teknologi informasi yang mendukung pelayanan perizinan secara elektronik (online), mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pelayanan.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

   Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

1. Persaingan antar daerah dalam menarik investasi semakin kompetitif.
2. Ketidakpastian ekonomi global akibat perang, krisis keuangan, atau faktor geopolitik lainnya dapat memengaruhi minat dan keputusan investasi.
3. Risiko bencana alam seperti banjir dan rob yang kerap terjadi di Kota Semarang dapat menghambat keberlangsungan investasi.
4. Ketidakpastian atau sering berubahnya kebijakan dan regulasi di bidang penanaman modal dan perizinan dapat menurunkan kepercayaan investor.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Kebijakan pemerintah pusat seperti Omnibus Law dan insentif fiskal yang mendukung peningkatan kemudahan berusaha dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi.
2. Terbukanya peluang kemitraan strategis dengan investor domestik maupun asing guna mendorong masuknya investasi.
3. Pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang investasi baru di sektor teknologi informasi dan komunikasi.
4. Kolaborasi dengan perguruan tinggi berpotensi mendorong inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti mendorong reformasi layanan publik.
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing daerah dan pembangunan ekonomi lokal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan

isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

2.2.1 Permasalahan DPMPTSP Kota Semarang

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu: “Belum Optimalnya Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah”yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Rumusan Permasalahan DPMPTSP Kota Semarang

Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum Optimalnya Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Belum Optimalnya Pembangunan Iklim Penanaman Modal yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.	Belum terwujudnya sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi penanaman modal, termasuk pemberian insentif dan kemitraan strategis antara regulasi di pusat dan daerah
		Belum optimalnya perencanaan investasi dan peta potensi yang terintegrasi menyebabkan arah kebijakan dan penetapan prioritas investasi daerah belum berjalan secara efektif dan terarah
	Belum Optimalnya Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.	Belum Optimalnya efektivitas promosi penanaman modal guna menarik investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.	Belum Optimalnya Kualitas Verifikasi dan Validasi Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
		Belum Optimalnya Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum Optimalnya Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.	Belum Optimalnya Kualitas Verifikasi dan Validasi Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan secara terpadu di Bidang Perekonomian
		Belum Optimalnya Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Perekonomian
		Belum Optimalnya Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Perekonomian
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.	Belum Optimalnya Kualitas Verifikasi dan Validasi Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan secara terpadu pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan
		Belum Optimalnya Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan
		Belum Optimalnya Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan
	Belum Optimalnya layanan penanganan pengaduan penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan melalui sistem terpadu yang responsif dan akuntabel	Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Respons Cepat Terhadap Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan
	Belum Optimalnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal untuk kepatuhan, ketertiban dan berkelanjutan investasi	Belum Optimalnya Fungsi Pengawasan, Pendampingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	Belum Optimalnya pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang aman,	Belum Optimalnya pengelolaan dan Pembaharuan Data Penanaman Modal dan Perizinan Secara Terintegrasi
		Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Permasalahan
	terpadu, akurat, relevan, dan mudah diakses	Serta Pembaharuan Data Perizinan
Belum Optimalnya Kualitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Belum Optimalnya kualitas pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Belum Optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
		Belum Optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
		Belum Optimalnya kualitas pengelolaan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
		Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
		Belum Optimalnya Kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
		Belum Optimalnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Belum Optimalnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

DPMPTSP Kota Semarang menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain belum optimalnya pertumbuhan nilai investasi daerah akibat kurang sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, perencanaan serta peta potensi investasi yang belum terintegrasi, dan promosi investasi yang belum efektif. Pelayanan perizinan dan non-perizinan di berbagai bidang juga belum maksimal, baik dari aspek verifikasi, penetapan, penerbitan, maupun respons terhadap pengaduan. Selain itu, fungsi pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi, serta kualitas kinerja internal—meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pengadaan, dan pemeliharaan aset—masih memerlukan peningkatan signifikan.

2.2.2 Telaah Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Visi RPJPN 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Bedaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Negara Nusantara merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai proses maritim dunia. Berdaulat memiliki makna ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju memiliki makna berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan memiliki makna lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan
Berdasarkan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 20252029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Pencapaian visi Presiden melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins), dan 320 Program Kerja. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Urusan penanaman modal secara substansial termasuk dalam Prioritas Nasional ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, serta Prioritas Nasional ke-5, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan demikian, penanaman modal memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja, pendorong kewirausahaan, penguatan daya saing industri, dan peningkatan nilai tambah produksi dalam negeri yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI, DAN INKLUSIF”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang penanaman modal, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah “Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto”.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi , PMTB terhadap PDRB.

c. Telaahan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029 berperan dalam mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-5 pada RPJMN yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, pada Sasaran Prioritas Nasional (PN) “Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”, dengan indikator PN “Pembentukan Modal Tetap

Bruto (Persen PDB)". Penanaman modal didorong bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Dan mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-7, yaitu: "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan", terutama memperkuat birokrasi diantaranya penguatan tata kelola OSS RBA. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya birokrasi penanaman modal yang adaptif dan melayani. Visi Penanaman Modal 2045 berdasarkan RUPM 2025-2045 yaitu "**Penanaman Modal yang Produktif dan Berkualitas melalui Perbaikan Iklim Investasi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045**".

Produktif dimaknai bahwa penanaman modal berkontribusi terhadap aspek-aspek perekonomian seperti: (i) menciptakan lapangan kerja; (ii) mendukung hilirisasi; (iii) mendorong transfer teknologi; (iv) mendorong penelitian dan pengembangan (RnD); dan (v) mendukung industri berorientasi ekspor dan spillover effect (pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun di daerah).

Berkualitas dimaknai bahwa penanaman modal dilakukan secara berkelanjutan serta mendukung *green economy* dan *blue economy*; dan meningkatkan stok infrastruktur di berbagai wilayah, inklusif antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Iklim Investasi dimaknai perbaikan penanaman investasi mengarah pada berbagai hal seperti: (i) kepastian hukum (ii) transparansi kebijakan; (iii) ketersediaan sumberdaya input; (iv) kemudahan berusaha; (v) layanan dan pendampingan; (vi) insentif yang mudah dan menarik; dan vii) stabilitas ekonomi dan politik.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tiga Misi yaitu: (1) mendukung iklim investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing; (2) mendukung penanaman modal pada sektor dan aktivitas yang memiliki efek pengganda paling besar terhadap perekonomian; dan (3) mendorong penanaman modal yang merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan data UN Trade and Development, tren FDI global yang cenderung turun. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu FDI Global tahun 2023 yang turun sebesar -2% (US$ 1,33 Triliun), FDI ke negara berkembang yang turun sebesar -7%, ekonomi global turun sebesar -2.7%, kondisi geopolitik belum mereda dan persaingan menarik investasi global semakin ketat. Negara-negara Eropa dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai banyak melirik Vietnam dan negara-negara di benua Afrika sebagai tujuan investasi.

d. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas

dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Meningkatkan Penanaman Modal
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Sasaran Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi PMTB terhadap PDRB
2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur struktur ruang, pola ruang, dan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Semarang dalam jangka panjang. RTRW memuat kebijakan dan strategi penataan ruang yang menjadi acuan bagi perangkat daerah yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang, pembangunan fisik, dan pengendalian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan hasil telaahan, substansi RTRW Kota Semarang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025–2029. Hal ini dikarenakan RTRW lebih berfokus pada pengaturan tata ruang dan penetapan zonasi wilayah, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena RTRW lebih berfokus pada pengaturan tata ruang, penetapan zonasi wilayah, serta arahan pembangunan fisik, sedangkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Semarang berada pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/non-perizinan.

Namun demikian, RTRW tetap memiliki posisi penting secara tidak langsung dalam mendukung kinerja DPMPTSP. Penetapan zonasi wilayah, ketersediaan lahan investasi, serta kepastian tata ruang menjadi faktor pendukung utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, meskipun keterkaitannya tidak bersifat langsung, RTRW dapat berfungsi sebagai landasan koordinasi lintas sektor yang memperkuat sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dan strategi penanaman modal di Kota Semarang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat, permasalahan lingkungan juga menjadi semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengutamakan kegiatan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan, termasuk terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka DPMPTSP Kota Semarang mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan. Berdasarkan KHLS isu yang terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah "**Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah**."

Tabel 2.8
Tema Isu KHLS terhadap Perangkat Daerah
DPMPTSP Kota Semarang

TEMA	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Ekonomi	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

Tabel 2.9
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario Upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
			NIHIL						

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

Sesuai dengan Kajian KHLS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 bahwa DPMPTSP Kota Semarang tidak mengampu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tertentu, namun keberadaan program dan kegiatan yang dijalankan DPMPTSP tetap memberikan kontribusi tidak langsung terhadap pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dalam program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mendukung upaya pencapaian sasaran "Terwujudnya kapasitas pembiayaan pembangunan yang inovatif", sekaligus mendukung pencapaian rekomendasi pada misi 5 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang unggul".

g. Telaahan Dokumen Lainnya

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

1. Penguatan Iklim Investasi yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.
2. Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.
3. Kemudahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.
4. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel.
5. Pengelolaan Data dan Standarisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi dan Akurat.
6. Isu Aksesibilitas Mal Pelayanan Publik akibat lokasinya yang berada di kawasan pinggiran kota, sehingga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dan pelaku usaha karena letaknya yang relatif jauh dari pusat aktivitas ekonomi maupun permukiman tertentu.

Tabel 2.10
Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan iklim penanaman modal, mulai dari penerbitan regulasi, pemberian fasilitasi dan kemudahan berusaha, kemitraan dan peta potensi investasi	Belum optimalnya iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	FDI ke negara berkembang yang turun sebesar -7%, ekonomi global turun sebesar -2.7%, kondisi geopolitik belum mereda dan persaingan menarik investasi global semakin ketat	Penanaman modal diarahkan dapat berkontribusi terhadap aspek-aspek perekonomian seperti menciptakan lapangan kerja, mendukung hilirisasi, mendorong transfer teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan (RnD), serta mendukung industri berorientasi ekspor dan *spillover effect*	Investor banyak berminat berinvestasi di Provinsi lain di Pulau Jawa mengingat ketersediaan sarana prasarana dan kawasan industri yang cukup lengkap serta aksesibilitas distribusi barang	Penguatan iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal
Digitalisasi Promosi potensi daerah dan kerja sama investasi	Promosi investasi belum efektif dan kurang inovatif				Daya dukung lingkungan yang terbatas	Promosi investasi secara progresif dan efektif melalui pendekatan inovatif, adaptif, dan berkelanjutan
penyederhanaan perizinan serta optimalisasi pelayanan perizinan dengan memanfaatkan sistem informasi	Kualitas verifikasi, penetapan, dan penerbitan izin belum optimal					Kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang responsif, cepat, tepat, dan transparan
Kewenangan pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Pengawasan dan pengendalian kepatuhan investasi belum maksimal					Sistem pengendalian dan pengawasan investasi untuk kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel
Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Data dan sistem informasi belum terintegrasi dan akurat					Pengelolaan data dan standarisasi sistem informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi dan akurat
Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan	Lokasi MPP di pinggiran kota mengurangi aksesibilitas sebagian masyarakat dan pelaku usaha					Isu aksesibilitas Mal Pelayanan Publik akibat lokasi di pinggiran kota

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBAJIKAN

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun, sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta pembangunan jangka panjang daerah. Renstra menjadi pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan sesuai kewenangan masing-masing, guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Perencanaan strategis ini disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi yang dimiliki, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Renstra disusun secara sistematis, berorientasi hasil (outcome), dan berbasis kinerja, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikator kinerja yang terukur. Selanjutnya, Renstra menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah sebagai bentuk operasionalisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi secara nasional.

Sesuai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang telah

disusun melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045, telah ditetapkan visi pembangunan daerah Kota Semarang. Visi pembangunan daerah tersebut adalah **"Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan."**. Visi tersebut merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kota Semarang Tahun 2005-2025 yang mengandung makna yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kota Metropolitan, mengandung makna peran dan fungsi Kota Semarang sebagai pusat aglomerasi wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Metropolitan Semarang diartikan sebagai metropolitan yang tidak hanya dibatasi oleh delineasi administratif tapi juga berdasarkan keterkaitan fungsi dengan daerah di sekitarnya. Dengan posisi letak Kota Semarang yang strategis yaitu di antara kota Jakarta dan kota Surabaya, berdekatan dengan Kawasan Industri Batang, Kendal, dan Brebes (pusat industri manufaktur dan teknologi di Indonesia), terhubung dengan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) nasional Candi Borobudur, dan peluang kedekatan akses dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru, di tahun 2045 Kota Semarang diharapkan dapat menjadi metropolitan yang berfungsi sebagai superhub yang didukung oleh konektivitas dan aksesibilitas yang baik. Dengan demikian perekonomian Kota Semarang akan meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pulau Jawa, yang berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045 diarahkan menjadi megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif,

terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai Kota Metropolitan, di tahun 2045 Kota Semarang dapat menjadi kota yang meningkat kualitas perannya sebagai tempat bermukim, pusat kegiatan dan pelayanan ekonomi (bekerja), serta jasa pendukung lainnya (rekreasi) yang nyaman dan layak, serta dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang dan wilayah sekitarnya.

Kota Layak Huni, mengandung makna bahwa Kota Semarang di tahun 2045 merupakan kota yang nyaman untuk dihuni dan beraktivitas oleh seluruh warga Kota Semarang maupun oleh warga sekitar Kota Semarang, baik dari sisi fisik (fasilitas perkotaan, permukiman, prasarana, sarana, dan lain-lain) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, karakter budaya, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). Sebagai kota yang layak huni, Kota Semarang diharapkan akan memiliki kualitas hidup tinggi, yang didukung oleh akses yang adil ke layanan perkotaan yang efisien; infrastruktur berkualitas, cerdas dan ramah lingkungan; sistem pemerintahan yang adaptif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pengambilan keputusan; memiliki perencanaan kota yang holistik; tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim; memiliki sistem ekonomi kota yang sirkular dan inklusif; memiliki sistem transportasi cerdas berkelanjutan.

Kota yang Maju, mengandung makna berdaya saing, tangguh, modern, inovatif, dan adil. Daya Saing, Perekonomian Kota Semarang mampu tumbuh di atas nasional dan provinsi dan berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan, terutama pada sektor jasa pendukung industri dan perdagangan, dengan sumber daya manusianya yang produktif, kreatif dan unggul serta mampu bersaing di persaingan global. Tangguh, Kota Semarang di tahun 2045 adalah kota yang mampu mengantisipasi, menghadapi dan menangani tantangan dan krisis dari alam dan non alam dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Modern, Kota Semarang yang modern adalah kota yang cerdas dengan dukungan infrastruktur mutakhir, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Pemerintah Kota Semarang dan warganya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan layanan perkotaan yang cerdas, efisien, efektif, terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau, yang didukung oleh riset dan inovasi. Inovatif, Kota Semarang memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar berpendidikan tinggi, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan teknologi terbaru, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan inovasi di berbagai sektor untuk menunjang produktivitas dan peningkatan kualitas hidup kota dan warganya. Dengan kota dan warga yang terus berinovasi, maka Kota Semarang menjadi kota yang efisien, efektif dan berkelanjutan, yang mampu menghadapi tantangan global yang kompleks dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Adil, Kota Semarang yang maju di tahun 2045 adalah kota yang mampu menghadirkan layanan perkotaan dan kesejahteraan yang inklusif ke seluruh masyarakat Kota Semarang secara adil dalam segala aspek tanpa diskriminasi.

Kota yang Berkelanjutan, Mengandung makna bahwa Kota Semarang menerapkan pembangunan yang menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat

juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan daya dukung dan daya tampung, dan memperhatikan kearifan lokal.

Berdasarkan visi dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dan mempertimbangkan evaluasi RPJMD Kota Semarang periode sebelumnya, serta mempertimbangkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas eksporimpor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitassejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargaiperbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

1. Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
2. Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
3. Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
4. Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi **"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif"**, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi sekolah swasta gratis, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial rumah inspirasi, dan pendampingan kelompok disabilitas seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program *urban farming*, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip *livability*. Akses air bersih dan sanitasi aman dan layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini,

Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, *bussiness matching* dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan *bus rapid transit* (BRT), peremajaan armada BRT secara merata dan proporsional di seluruh koridor, perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori),rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatandini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota jugamenggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaansampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakatdalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif bagi wilayahyang berhasil mengelola ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan.Tujuannya adalah

menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. *Smart city* dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Visi dan misi Kota Semarang didukung dengan tagline:

Tabel 3.1
Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat!	
Bangun Infrastruktur Berkualitas	*Humanis dalam Melayani*
Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan	*Ekonomi Inklusif*
Ramah Lingkungan	*Budaya yang Dilestarikan*
Sosial Harmonis Tanpa Konflik	*Aksesibilitas Meningkat*
Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin	*Tangguh menghadapi Tantangan*
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Utamakan Kesejahteraan Bersama	

a. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Ketercapaian visi selama lima tahun dirumuskan dalam tujuan yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan arah capaian visi. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan *(policy planning)* yang memiliki titik kritis *(critical point)* dalam penyusunan Renstra. Bilamana visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam program kegiatan pada perangkat daerah.

Tujuan merupakan dampak *(impact)* keberhasilan perangkat daerah daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang

menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Dalam perumusannya, tujuan harus bersifat Specific, Measureable, Attainable, Relevant, and Timebound (SMART). Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan disusun dan dirumuskan dari visi dan misi Kepala Daerah yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan pencapaian visi yang diturunkan menjadi pokok visi. Selain itu, perumusan tujuan berpedoman dan mengacu pada RPJMN 2025-2029, RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Tujuan RPJMN Tahun 2025-2029 yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah "Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025". Kota Semarang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam 2025-2029. Dalam konstelasi Wilayah Metropolitan Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal Semarang-Demak-Kudus dan Kota Semarang sebagai wilayah pesisir, tujuan pembangunan kota Semarang tahun 2025-2029 harus mengacu pada tujuan pembangunan RPJMN 2025-2029.

Tujuan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 adalah "perwujudan Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan", yang dijabarkan menjadi Kota Metropolitan yang Layak Huni, Kota Metropolitan yang Maju, dan Kota Metropolitan yang Berkelanjutan. Tujuan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur nomor 6 Tahun 2025 adalah "perwujudan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan". Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis menjadi representasi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Selain ibu kota Provinsi, Kota Semarang berperan sebagai Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang bersinergi dalam potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Dengan peran di dalam Provinsi Jawa Tengah tersebut, tujuan pembangunan kota Semarang tahun 2025-2029 harus mempedomani dan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Tujuan dari setiap pokok visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pada pokok visi **Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif**, dirumuskan tujuan sebagai berikut:
    a. Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif,dan berdaya saing. Tujuan ini diimplementasikan dengan meningkatkan potensi sumber daya lokal yang berdaya saing global berlandaskan riset dan inovasi. potensi sumber daya lokal yangmelimpah. Produk-produk unggulan, seperti hasil pertanian,kerajinan tangan, dan industri kreatif, didorong untuk masuk kepasar global melalui promosi internasional dan pengembangan jaringan perdagangan. Hal ini dapat menjadikan Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang maju.
    b. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata danmenunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata, daninklusif diharapkan mampun dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa terkecuali. Infrastruktur merupakan tulang punggung bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruk tur diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang efisien antar wilayah, baik dalam bentuk jaringan transportasi, jalan raya, jembatan maupun utilitas publik seperti air bersih, listrik, dan internet. Konektivitas antar wilayah ditingkatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa secara efisien.

c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender memiliki peran penting dalam upaya peningkatankualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya kualitas sumber daya manusiaakan meningkatkan indeks pembangunan Manusia Kota Semarang sehingga sumber daya manusia Kota Semarang akan unggul, produktif dan berbudaya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dan meningkatkan daya saing Kota Semarang.
d. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Penciptaan lingkungan sosial yang harmonis dan stabilitas politik yang kondusif merupakan prioritas utama. Melalui dialog terbuka, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebhinekaan, Kota Semarang bertekad untuk menjaga kerukunan antarwarga dan menghindari konflik sosial. Stabilitas politik yang terjaga akan mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan-kebijakan yang inklusif dan adil.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari misi kesatu, misi kedua, misi keempat, dan misi kelima.

2. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif, dirumuskan tujuan Menurunnya kemiskinan secara inklusif, Penurunan kemiskinan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penjaminan ketersediaan pangan, sandang, dan papan dan memastikan bahwa semua warga Kota Semarang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar ini, sehingga diharapkan juga akan meningkatkan kualitas keluarga.

   Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketiga.

3. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat, Kota Semarang berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi semua warga.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi keenam.

4. Pada pokok visi Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat, Meningkatnya tata kelola pemerintahan menjadi prioritas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Proses administrasi dipermudah dan dipercepat melalui digitalisasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Tata kelola pemerintahan yang matang dan berbasis data merupakan kunci keberhasilan pembangunan.

   Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketujuh.

   Perumusan tujuan dan keterkaitannya 2025-2029 disajikan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	POKOK VISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN
1	Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%
		Meningkatnya infrastruktuyang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklus bagi seluruh masyarakat	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka
		Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Angka
2	Pusat Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif	Menurunnya kemiskinan secara inklusif	Angka Kemiskinan	%
			Rasio Gini	Angka
3	Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat	Nilai Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota	Nilai
4	Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang penanaman modal. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan.

Dalam rangka mendukung pokok visi Kota Semarang sebagai **Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif**, serta mewujudkan misi ke-4 RPJMD yang menekankan perekonomian inklusif berbasis kemandirian ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan ekonomi kreatif ke tingkat global, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan tujuan strategis yaitu "**Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Semarang"**. Tujuan ini selaras dengan tujuan RPJMD yaitu Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi, DPMPTSP berupaya mencapai target indikator tujuan yaitu "**tingkat pertumbuhan nilai investasi daerah"** yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Peningkatan penanaman modal ini akan diukur melalui tingkat pertumbuhan nilai investasi daerah, yang mencerminkan peningkatan realisasi investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Perumusan tujuan Renstra DPMPTSP 2025-2029 dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Tabel Keselarasan Tujuan RPJMD Kota Semarang
dan Renstra DPMPTSP Kota Semarang

Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Misi ke-4	Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Renstra	Satuan
Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif. Pokok Visi I : Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan ekonomi kreatif ke level global.	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing	Meningkatnya Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%

b. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran disusun dan dirumuskan dari visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah. Selain itu, perumusan sasaran berpedoman dan mengacu pada sasaran RPJPN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2029, ditetapkan sasaran, (1) Meningkatnya Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju, (2) Kepemimpinan dan Pengaruh Di Dunia Internasional Meningkat, (3) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, dan (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Sasaran tersebut disusun dalam mendukung tujuan perwujudan Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, ditetapkan sasaran (1) Terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing yang inklusif, (2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis, (4) Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah, (5) Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial, dan (6) Terwujudnya Ketahanan Sumber

Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana. Sasaran pembangunan tersebut disusun dalam mendukung perwujudan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, ditetapkan sasaran (1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, inklusif, dan berbudaya, (2) Terwujudnya Perekonomian Kota yang Tangguh dan Berkeadilan, (3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel,(4) Terwujudnya Ketahanan Kota yang berbasis ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas, dan Masyarakat, dan (5) Perwujudan Infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan. Sasaran tersebut disusundalam mendukung tujuan perwujudan Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan.

Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, melalui indikator LPE Sektor Perdagangan dan Jasa
   - Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, melalui PMTB terhadap PDRB.
   - Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa, melalui indikator tingkat inflasi
2. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan, melalui indikator tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah.
   - Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis, melalui indikator tingkat pengembangan kawasan strategis.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan, diukur melalui Indeks Kesehatan.
   - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata, diukur melalui Indeks Pendidikan.
   - Meningkatnya kesetaraan gender, melalui Indeks Pembangunan Gender.
4. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya kualitas demokrasi politik, melalui indikator indeks demokrasi Indonesia

- Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan, melalui angka kriminalitas.

5. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya kualitas demokrasi politik, melalui indikator indeks demokrasi Indonesia
   - Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan, melalui angka kriminalitas.
6. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Menurunnya dampak perubahan iklim, melalui indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Indek Kualitas Lingkungan Hidup.
   - Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan, melalui indikator Indeks risiko bencana.
   - Menurunnya kawasan banjir dan rob, melalui indikator persentase kawasan banjir dan rob.
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   - Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional.
   - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.
   - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, melalui PMTB terhadap PDRB. DPMPTSP Kota Semarang menetapkan dua sasaran strategis dalam Renstra periode 2025–2029 yaitu :

1. meningkatkan realisasi investasi
   indikator : Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)
2. meningkatkan kinerja DPMPTSP
   indikator **:** Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran pertama adalah meningkatkan realisasi investasi, yang menjadi tolok ukur dalam menggerakkan nilai pembentukan modal tetap bruto di Kota Semarang. Realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diharapkan dapat tumbuh secara signifikan melalui upaya peningkatan promosi investasi, optimalisasi potensi dan peluang usaha, fasilitasi perizinan dan pendampingan pelayanan perizinan berusaha, serta pengendalian dan pengawasan investasi. Dengan demikian, sasaran ini sejalan langsung dengan sasaran

RPJMD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju dan inklusif.

Sasaran kedua adalah meningkatkan kinerja DPMPTSP, yang diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Peningkatan kinerja ini sangat penting untuk menciptakan sistem pelayanan investasi yang handal, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan investor dan masyarakat. Dengan pelayanan yang prima, DPMPTSP dapat memfasilitasi iklim investasi yang kondusif dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD secara optimal.

Dengan dua sasaran tersebut, DPMPTSP berkomitmen berperan aktif dalam memperkuat perekonomian Kota Semarang melalui peningkatan penanaman modal yang berdampak pada pembentukan modal tetap bruto, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung pertumbuhan investasi berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran
Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Peningkatan Nilai Penanaman Modal (Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020) Sasaran RPJMD : Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	Meningkatnya Penanaman Modal		Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	0,38	0,75	1,50	2,25	3	3,75	
		Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)	Rupiah	9.900.000.000.000	9.974.250.000.000	10.123.863.000.000	10.351.650.000.000	10.662.200.000.000	11.062.032.000.000	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	78	78,2	78,5	78.6	78,7	79	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	90	90	90	90	90	90	

b. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Penahapan Renstra

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Iklim Investasi dan Infrastruktur Pelayanan	Percepatan Penguatan Iklim Investasi dan Promosi Investasi	Digitalisasi Sistem Informasi dan Pemantapan Kepatuhan Investasi	Inovasi Pelayanan Publik	Pencapaian Target Renstra dan Rencana Lanjutan
Penguatan landasan regulasi investasi, pemetaan potensi investasi, peningkatan kapasitas SDM,	Lanjutan penguatan regulasi investasi disertai percepatan intensifikasi	Optimalisasi digitalisasi sistem informasi penanaman modal dan pelaporan, peningkatan integrasi data, serta	Implementasi inovasi layanan yang adaptif, efisien, responsif terhadap	Penuntasan capaian kinerja strategis untuk mendukung visi pembangunan daerah serta penyusunan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
serta penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di lokasi baru sebagai penguat infrastruktur layanan investasi.	promosi investasi melalui pemanfaatan kanal digital, forum bisnis, serta sinergi dengan stakeholder strategis.	pemantapan kepatuhan dan pengawasan investasi.	kebutuhan masyarakat, dan berbasis teknologi digital.	arah pengembangan DPMPTSP selanjutnya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi pada tujuan dan sasaran RPJMD. seperti yang bisa dilihat pada tabel 3.4. berikut ini :

Tabel 3.6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan DPMPTSP Kota Semarang

POKOK VISI/MISI/TUJUAN	**SASARAN RPJMD**		**STRATEGI**
Pokok Visi: Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif			
Misi 4: Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif ke level global.			
T1: Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif	2	Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	Penguatan kualitas produktivitas masyarakat sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital dan ekonomi syariah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang turut mendukung strategi pembangunan daerah yang diarahkan pada penguatan kualitas produktivitas masyarakat di sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal. Dukungan ini diwujudkan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan ekonomi syariah dalam kebijakan dan layanan investasi. Sebagai garda terdepan dalam penciptaan iklim investasi dan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Semarang memegang peranan strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal. Untuk mendukung hal tersebut, DPMPTSP menerapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH		STRATEGI	
Meningkatnya Penanaman Modal	1	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang	1	Penguatan Iklim Penanaman Modal yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.
			2	Mengoptimalkan Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.
			3	Peningkatan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan sekaligus Meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan penanganan pengaduan penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan melalui sistem terpadu yang responsif dan akuntabel
			4	Penguatan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel.
			5	Pengelolaan Data dan Standarisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi dan Akurat.
	2	Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	Peningkatan Kinerja Pelayanan Organisasi yang Profesional

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, rumusan strategi DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Iklim Investasi yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.

   DPMPTSP Kota Semarang berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif dan berkelanjutan melalui kebijakan penanaman modal, insentif dan kemudahan berusaha, serta penguatan regulasi yang mendukung investasi di sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.

   Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Masterplan Investasi yang didukung dengan Platform Peta Potensi Investasi Daerah, yang menjadi acuan dalam penetapan prioritas investasi serta promosi peluang usaha yang berbasis data, sektoral, dan kewilayahan.
2. Optimalisasi Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.

   DPMPTSP Kota Semarang mengoptimalkan promosi investasi melalui pendekatan yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan investor.

Strategi ini dilaksanakan melalui penyusunan dokumen *investment development brief*, penyelenggaraan forum investasi, business matching, sharing session, serta aktif dalam menawarkan potensi investasi melalui pemanfaatan berbagai platform digital untuk publikasi peluang investasi yang interaktif dan mudah diakses.

Fokus promosi diarahkan pada sektor unggulan daerah dan kawasan strategis guna menarik investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Kota Semarang sebagai tujuan investasi strategis di tingkat nasional maupun global.

3. Peningkatan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.

   DPMPTSP Kota Semarang berkomitmen menyelenggarakan layanan perizinan dan non-perizinan yang mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta mendukung kemudahan berusaha.

   Pelayanan dilakukan secara terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan platform digital perizinan, dengan proses yang didasarkan pada standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan akuntabel. Setiap proses layanan dilengkapi dengan sistem tracking, notifikasi digital, dan media pengaduan yang responsif.

4. Penguatan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel.

   Pengawasan dan pendampingan terhadap realisasi investasi dilakukan melalui sistem pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang terintegrasi dengan sistem OSS, dan monitoring langsung.

   Hal ini bertujuan guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan pelaksanaan penanaman modal. Penguatan Sistem Pengendalian Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel

5. Pengelolaan Data dan Standarisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi dan Akurat.

   Pemutakhiran data investasi dan pengelolaan sistem informasi dilakukan secara berkala melalui *dashboard* data penanaman modal dan perizinan berbasis digital untuk menjaga keamanan, keakuratan, dan relevansi data agar tetap *uptodate* .

   Pemutakhiran data tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk untuk mendukung strategi promosi dan pengembangan potensi daerah serta menjaga kepercayaan dan kepuasan pelaku usaha.

6. Peningkatan Kinerja Pelayanan Organisasi yang Profesional

   Untuk mendukung seluruh strategi di atas, DPMPTSP memperkuat manajemen SDM dan sistem pelayanan umum melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, reformasi

birokrasi, evaluasi kinerja, serta digitalisasi proses layanan. Pengmbangan budaya kerja dilaksanakan dengan berorientasi pada pelayanan prima dan profesionalisme terus ditanamkan untuk menjaga kepercayaan publik.

c. Arah Kebijakan perangkat Daerah

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Tabel 3.8
Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2025-2029

OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN RPJMD yang relevan	**ARAH KEBIJAKAN RPJMD**	**SASARAN RENSTRA**		**ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD**	**KET**
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
Operasionalisasi NSPK : Peningkatan Nilai Penanaman Modal (Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020)	Arah Kebijakan RPJMD Kota Semarang adalah sebagai berikut : Penguatan UMKM berbasis potensi lokal	Strategi Renstra DPMPTSP Kota Semarang Adalah Sebagai Berikut :		Untuk mendukung Strategi Renstra pada maka arah kebijakan yang dirumuskan oleh DPMPTSP Kota Semarang adalah :	
Sasaran RPJMD: Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	dengan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital; Peningkatan ekosistem kewirausahaan melalui inkubasi bisnis dan kemitraan strategis; Pengembangan ekonomi kreatif dan digital, termasuk talenta digital muda; Penyediaan pelatihan kerja berbasis industri dan kebutuhan pasar tenaga kerja; Penataan kawasan ekonomi strategis dan destinasi wisata berbasis kearifan lokal	1.	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang	1. Meningkatkan Penguatan Kebijakan terkait Penanaman Modal, disertai fasilitasi insentif serta fasilitasi kemitraan strategis guna menciptakan iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di daerah.	
				2. Meningkatkan Penguatan Regulasi dan perencanaan investasi melalui penyusunan RUPMD dan Masterplan Investasi yang didukung dengan Platform Peta Potensi Investasi Daerah	
				3. Peningkatan efektivitas promosi penanaman modal guna menarik investasi yang	

OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN RPJMD yang relevan	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	SASARAN RENSTRA		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
				berkualitas, ramah lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.	
				4. Peningkatan Kualitas Verifikasi dan Validasi Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.	
				5. Peningkatan Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.	
				6. Peningkatan Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.	
				7. Penguatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Respons Cepat Terhadap Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelaku usaha.	
				8. Penguatan Fungsi Pengawasan, Pendampingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal guna memastikan kepatuhan, ketertiban dan berkelanjutan investasi	
				9. Penguatan pengelolaan dan Pembaharuan Data Penanaman Modal dan Perizinan Secara	

OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN RPJMD yang relevan	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	SASARAN RENSTRA		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
				Terintegrasi Guna Memastikan Keamanan, Keakuratan, dan Relevansi Data Supaya Selalu Mutakhir	
				10. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Serta Pembaharuan Data Perizinan guna Memastikan Keakuratan dan Relevansi Informasi.	
		2.	Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
				12. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
				13. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
				14. Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
				15. Meningkatkan Kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
				16. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				17. Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif

dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Semarang. Dari hasil analisis tersebut dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah ditetapkan beberapa sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dalam Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran – sasaran tersebut kemudian dirumuskan beberapa strategi, yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang

Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi 1.1 Penguatan Iklim Investasi yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan Penguatan Kebijakan terkait Penanaman Modal, disertai fasilitasi insentif serta fasilitasi kemitraan strategis guna menciptakan iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di daerah.
2. Meningkatkan Penguatan Regulasi dan perencanaan investasi melalui penyusunan RUPMD dan Masterplan Investasi yang didukung dengan Platform Peta Potensi Investasi Daerah

Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Strategi 1.2 Optimalisasi Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan efektivitas promosi penanaman modal guna menarik investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal

Strategi 1.3 Peningkatan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Verifikasi dan Validasi Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.
3. Peningkatan Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.
4. Penguatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Respons Cepat Terhadap Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelaku usaha.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal

Strategi 1.4 Penguatan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Pendampingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal guna memastikan kepatuhan, ketertiban dan berkelanjutan investasi

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Strategi 1.5 Pengelolaan Data dan Standarisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi dan Akurat.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Penguatan pengelolaan dan Pembaharuan Data Penanaman Modal dan Perizinan Secara Terintegrasi Guna Memastikan Keamanan, Keakuratan, dan Relevansi Data Supaya Selalu Mutakhir
2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Serta Pembaharuan Data Perizinan guna Memastikan Keakuratan dan Relevansi Informasi.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sasaran 2

Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 2.1 Peningkatan Kinerja Pelayanan Organisasi yang Profesional.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
5. Meningkatkan Kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan PD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
NSPK : Peningkatan Nilai Penanaman Modal (Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020) Sasaran RPJMD yang Relevan : Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	Meningkatnya Penanaman Modal				Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah		Kepala DPMPTSP
		Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang			Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)		Kepala DPMPTSP
			Meningkatnya Ekosistem Penanaman Modal Yang Berkelanjutan		Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
				Tersedianya Kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Laporan Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
				Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya Eksposur Potensi Daerah Kepada Calon Investor		Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
				Tersedianya Dokumen Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	Jumlah Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
						2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	
						2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang		Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Kesejahteraan Rakyat				
				Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data Perizinan yang Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Perekonomian		Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II
				Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data engajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data Perizinan yang Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	"2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik"	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan		Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III
				Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data engajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Pembangunan yang Ditetapkan			Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data Perizinan yang Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III / Ketua Tim Kerja Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko"	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal dan perizinan		Persentase Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang Ditindak Lanjuti	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
				Tersedianya Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Subkoordinator Pengaduan Layanan Penanaman Modal Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja
				Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel		Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
				Tersedianya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksaaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi		Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
				Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan		2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Subkoordinator Sistem Informatika Pada

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di monitoring dan dievaluasi			Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
		Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		Kepala DPMPTSP
					1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		Kepala DPMPTSP
						2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Pintu Kota Semarang				
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarangbeserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Pada Sekretariat/ Ketua Tim Kerja
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah / Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Prognosis Realisasi Anggaran			
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		Kepala DPMPTSP
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Terpenuhinya Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian / Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian / Ketua Tim Kerja

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian / Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian / Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas

DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan realisasi investasi di Kota Semarang dengan penyederhanaan regulasi investasi	Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Pemberian insentif investasi	Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
3	Peningkatan angka investasi di Kota Semarang	Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
4	Digitalisasi proses perijinan dan regulasi ramah investasi	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
5	Pelaksanaan fasilitasi promosi investasi ke pasar nasional dan internasional	Meningkatnya Eksposur Potensi Daerah Kepada Calon Investor	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menetapkan beberapa sub kegiatan prioritas yang selaras dengan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan ini dirancang untuk memperkuat ekosistem investasi yang berkelanjutan, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperluas eksposur potensi investasi Kota Semarang kepada pasar nasional dan internasional.

Pertama, upaya peningkatan realisasi investasi ditempuh melalui penyederhanaan regulasi investasi yang menyesuaikan dengan ketentuan nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Langkah ini mencakup penyesuaian perda/perwal, simplifikasi prosedur perizinan, dan koordinasi lintas perangkat daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kedua, pemberian insentif investasi difokuskan untuk menarik minat investor strategis dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Kegiatan ini meliputi penyusunan mekanisme pemberian insentif, fasilitasi pengajuan, serta evaluasi efektivitas insentif dalam mendorong pertumbuhan investasi.

Ketiga, peningkatan angka investasi juga didukung oleh penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Melalui verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), pemantauan realisasi investasi, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, diharapkan kepatuhan pelaku usaha dapat terjaga dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah.

Keempat, digitalisasi proses perizinan menjadi prioritas untuk meningkatkan kemudahan pelayanan penanaman modal. Melalui pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, sistem OSS-RBA, dan SIMBG, pelayanan diharapkan lebih cepat, tepat, dan transparan. Pengembangan integrasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan kanal konsultasi online akan memangkas birokrasi dan meningkatkan kepuasan investor.

Kelima, fasilitasi promosi investasi diarahkan untuk memperluas jangkauan promosi potensi daerah melalui penyelenggaraan investment forum, business matching, partisipasi dalam pameran investasi nasional maupun internasional, serta penyusunan profil peluang investasi daerah dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan eksposur Kota Semarang di mata investor global dan nasional.

Dengan pelaksanaan subkegiatan prioritas tersebut secara terintegrasi, diharapkan target-target kinerja Renstra dapat tercapai, sekaligus mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Semarang.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Watu Pintu Kota Semarang terdapat pada lampiran tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Penanaman Modal													
Tujuan : Meningkatnya Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	10,03%	0,75%	19.644.829.946	1,50%	21.828.422.875	2,25%	22.778.824.158	3%	22.953.399.368	3,75%	23.365.186.137	Kepala Dinas
Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)	28.261.147.844.942	9.974.250.000.000	5.688.705.603	10.123.863.000.000	6.290.545.767	10.351.650.000.000	6.552.494.621	10.662.200.000.000	6.600.610.903	11.062.032.000.000	6.714.107.248	Kepala Dinas
2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Ekosistem Penanaman Modal Yang Berkelanjutan	N/A	2,5%	945.046.164	3%	1.045.027.913	3,50%	1.088.544.625	4%	1.096.538.026	4%	1.115.392.805	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	5 Kegiatan	2 Kegiatan	276.693.317	2 Kegiatan	357.664.574	2 Kegiatan	373.270.779	2 Kegiatan	379.717.746	2 Kegiatan	387.438.082	Subkoordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal/ Ketua Tim Kerja
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	108.930.555	1 Dokumen	178.093.352	1 Dokumen	192.294.373	1 Dokumen	198.581.798	2 Dokumen	200.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN)	5 Dokumen	4 Dokumen	167.762.762	5 Dokumen	179.571.222	5 Dokumen	180.976.406	6 Dokumen	181.135.948	6 Dokumen	187.438.082	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemerintah Kabupaten/Kota	dengan UMKM di daerah												
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	668.352.847	2 Kegiatan	687.363.339	2 Kegiatan	715.273.846	2 Kegiatan	716.820.280	2 Kegiatan	727.954.723	Sub Koordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	138.322.071	2 Dokumen	148.735.170	2 Dokumen	166.520.750	2 Dokumen	167.260.368	2 Dokumen	173.505.547	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	530.030.776	3 Dokumen	538.628.169	3 Dokumen	548.753.096	3 Dokumen	549.559.912	3 Dokumen	554.449.176	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Eksposur Potensi Daerah Kepada Calon Investor	N/A	70%	1.406.764.362	75%	1.555.593.877	80%	1.620.371.409	85%	1.632.270.122	90%	1.660.336.720	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	N/A	2 Dokumen	1.406.764.362	2 Dokumen	1.555.593.877	2 Dokumen	1.620.371.409	2 Dokumen	1.632.270.122	2 Dokumen	1.660.336.720	Subkoordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15 Dokumen	4 Dokumen	1.406.764.362	12 Dokumen	1.555.593.877	12 Dokumen	1.620.371.409	12 Dokumen	1.632.270.122	12 Dokumen	1.660.336.720	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal				3.063.508.947		3.387.614.791		3.528.680.740		3.554.592.550		3.615.713.145	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				3.063.508.947		3.387.614.791		3.528.680.740		3.554.592.550		3.615.713.145	
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	96,91%	100%	1.039.815.546	100%	1.148.717.818	100%	1.159.553.691	100%	1.167.810.713	100%	1.181.704.374	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	N/A	6.000 Pengajuan Perizinan	1.039.815.546	7.000 Pengajuan Perizinan	1.148.717.818	8.000 Pengajuan Perizinan	1.159.553.691	9.000 Pengajuan Perizinan	1.167.810.713	10.000 Pengajuan Perizinan	1.181.704.374	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	N/A	6.000 Pengajuan Perizinan		7.000 Pengajuan Perizinan		8.000 Pengajuan Perizinan		9.000 Pengajuan Perizinan		10.000 Pengajuan Perizinan		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang	Tersedianya Data Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan	N/A	6.000 Perizinan		7.000 Perizinan		8.000 Perizinan		9.000 Perizinan		10.000 Perizinan		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I Pada Bidang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota													Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	75 Dokumen	1.039.815.546	85 Dokumen	1.148.717.818	90 Dokumen	1.159.553.691	88 Dokumen	1.167.810.713	86 Dokumen	1.181.704.374	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Perekonomian	96,91%	100%	905.913.177	100%	963.459.763	100%	1.009.829.739	100%	1.011.301.083	100%	1.020.206.385	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	N/A	2.600 Pengajuan Perizinan		2.700 Pengajuan Perizinan		2.800 Pengajuan Perizinan		2.900 Pengajuan Perizinan		3.000 Pengajuan Perizinan		Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	N/A	2.600 Pengajuan Perizinan	905.913.177	2.700 Pengajuan Perizinan	963.459.763	2.800 Pengajuan Perizinan	1.009.829.739	2.900 Pengajuan Perizinan	1.011.301.083	2.900 Pengajuan Perizinan	1.020.206.385	Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non	Tersedianya Data Perizinan Pada Bidang	N/A	2.600 Perizinan		2.700 Perizinan		2.800 Perizinan		2.900 Perizinan		2.900 Perizinan		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Perekonomian Diterbitkan												Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2450 Pelaku Usaha	2600 Pelaku Usaha	905.913.177	2.700 Pelaku Usaha	963.459.763	2.800 Pelaku Usaha	1.009.829.739	2.900 Pelaku Usaha	1.011.301.083	3.000 Pelaku Usaha	1.020.206.385	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan	96,91%	100%	824.336.857	100%	945.108.148	100%	1.002.151.361	100%	1.012.160.321	100%	1.026.247.662	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	N/A	1.100 Pengajuan Perizinan	824.336.857	1.200 Pengajuan Perizinan	945.108.148	1.300 Pengajuan Perizinan	1.002.151.361	1.400 Pengajuan Perizinan	1.012.160.321	1.500 Pengajuan Perizinan	1.026.247.662	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Tersedianya Data engajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan	N/A	1.100 Pengajuan Perizinan		1.200 Pengajuan Perizinan		1.300 Pengajuan Perizinan		1.400 Pengajuan Perizinan		1.500 Pengajuan Perizinan		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Daerah Kabupaten/ Kota													
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	N/A	1.100 Perizinan		1.200 Perizinan		1.300 Perizinan		1.400 Perizinan		1.500 Perizinan		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	1.100 Pelaku Usaha	824.336.857	1.200 Pelaku Usaha	945.108.148	1.300 Pelaku Usaha	1.002.151.361	1.400 Pelaku Usaha	1.012.160.321	1.500 Pelaku Usaha	1.026.247.662	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal dan perizinan	96,91%	95%	293.443.367	95%	330.329.062	95%	357.145.949	95%	363.320.433	95%	387.554.724	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	N/A	12 Laporan	293.443.367	12 Laporan	330.329.062	12 Laporan	357.145.949	12 Laporan	363.320.433	12 Laporan	387.554.724	Subkoordinator Pengaduan Layanan Penanaman Modal Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	800 Kegiatan Usaha	48 Kegiatan Usaha	293.443.367	54 Kegiatan Usaha	330.329.062	60 Kegiatan Usaha	357.145.949	66 Kegiatan Usaha	363.320.433	72 Kegiatan Usaha	387.554.724	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
berusaha berbasis risiko	berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha												
2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	103,29%	100%	138.593.380	100%	153.255.953	100%	159.637.788	100%	160.810.040	100%	163.575.140	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksaaan Penanaman Modal	N/A	4 Kegiatan	138.593.380	4 Kegiatan	153.255.953	4 Kegiatan	159.637.788	4 Kegiatan	160.810.040	4 Kegiatan	163.575.140	Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal/ Ketua Tim Kerja
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	30.789.007	150 Pelaku Usaha	42.988.393	170 Pelaku Usaha	44.832.545	170 Pelaku Usaha	45.014.895	170 Pelaku Usaha	45.445.022	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	26 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	107.804.373	150 Kegiatan Usaha	110.267.560	180 Kegiatan Usaha	114.805.243	180 Kegiatan Usaha	115.795.145	180 Kegiatan Usaha	118.130.118	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi	97%	100%	134.792.750	100%	149.053.233	100%	155.260.059	100%	156.400.165	100%	159.089.438	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	N/A	12 Laporan	134.792.750	12 Laporan	149.053.233	12 Laporan	155.260.059	12 Laporan	156.400.165	12 Laporan	159.089.438	Subkoordinator Sistem Informatika Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di monitoring dan dievaluasi	N/A	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan / Ketua Tim Kerja
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	12 Dokumen	134.792.750	12 Dokumen	149.053.233	12 Dokumen	155.260.059	12 Dokumen	156.400.165	12 Dokumen	159.089.438	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,35	78,2	9.554.938.455	78,5	10.504.088.642	78.6	10.505.325.784	78,7	11.014.129.049	79	11.548.720.074	Kepala Dinas
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	90	4.401.185.888	90	5.033.788.466	90	5.721.003.753	90	5.338.659.416	90	5.102.358.815	Kepala Dinas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.956.124.343		15.537.877.108		16.226.329.537		16.352.788.465		16.651.078.889	Sekretaris
Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,35	78,2	9.554.938.455	78,5	10.504.088.642	78.6	10.505.325.784	78,7	11.014.129.049	79	11.548.720.074	Kepala Dinas
2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	100%	9.554.938.456	100%	10.504.088.641	100%	10.505.325.785	100%	11.014.129.051	100%	11.548.720.075	Sekretaris
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarangbeserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	24.537.428	100%	27.345.279	100%	28.582.421	100%	28.828.605	100%	29.376.187	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Pada Sekretariat / Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	1.351.276	4 Dokumen	1.505.904	4 Dokumen	1.574.033	4 Dokumen	1.587.591	4 Dokumen	1.617.746	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.137	1 Dokumen	2.785.116	1 Dokumen	2.911.119	1 Dokumen	2.936.193	1 Dokumen	2.991.965	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.173.361	1 Dokumen	5.765.356	1 Dokumen	6.026.189	1 Dokumen	6.078.094	1 Dokumen	6.193.543	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.007.422	1 Dokumen	3.351.566	1 Dokumen	3.503.196	1 Dokumen	3.533.369	1 Dokumen	3.600.483	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.477.726	1 Dokumen	7.218.981	1 Dokumen	7.545.579	1 Dokumen	7.610.570	1 Dokumen	7.755.128	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.805.518	1 Laporan	2.012.126	1 Laporan	2.103.158	1 Laporan	2.121.272	1 Laporan	2.161.565	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4 Laporan	3.218.471	4 Laporan	3.586.765	4 Laporan	3.749.036	4 Laporan	3.781.327	4 Laporan	3.853.151	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.004.517	1 Dokumen	1.119.465	1 Dokumen	1.170.111	1 Dokumen	1.180.189	1 Dokumen	1.202.606	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.02 Administrasi	Terwujudnya tertib administrasi dan	100%	100%	9.530.401.027	100%	10.476.743.363	100%	10.476.743.363	100%	10.985.300.444	100%	11.519.343.887	Subbagian Keuangan dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Keuangan Perangkat Daerah	pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang												Barang Milik Daerah/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	62 Orang/bulan	9.224.621.477	62 Orang/bulan	10.170.145.178	62 Orang/bulan	10.170.145.178	62 Orang/bulan	10.678.652.437	62 Orang/bulan	11.212.585.059	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	26 Dokumen	300.813.623,97	26 Dokumen	300.813.623	26 Dokumen	300.813.623	26 Dokumen	300.813.623	26 Dokumen	300.813.623	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.806.522	1 Laporan	2.104.328	1 Laporan	2.104.328	1 Laporan	2.122.453	1 Laporan	2.162.767	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.353.887	18 Laporan	1.577.076	18 Laporan	1.577.076	18 Laporan	1.590.659	18 Laporan	1.620.873	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.805.518	1 Dokumen	2.103.158	1 Dokumen	2.103.158	1 Dokumen	2.121.272	1 Dokumen	2.161.565	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	90	4.401.185.888	90	5.033.788.466	90	5.721.003.753	90	5.338.659.416	90	5.102.358.815	Kepala Dinas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	100%	4.401.185.887	100%	5.033.788.467	100%	5.721.003.752	100%	5.338.659.414	100%	5.102.358.814	Sekretaris
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	600.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 Unit	100 Unit	50.000.000	100 Unit	50.000.000	100 Unit	100.000.000	100 Unit	50.000.000	100 Unit	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	50.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	200.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	100 Orang	50.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	200.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06 Administrasi	Terpenuhinya pelayanan	100%	100%	830.000.000	100%	930.000.000	100%	1.080.000.000	100%	1.080.000.000	100%	1.080.000.000	Subbagian Umum dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Umum Perangkat Daerah	administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan												Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	3 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Elektronik pada SKPD	Elektronik pada SKPD												
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	N/A	100%	300.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	536.300.601	100%	200.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	2 Unit	300.000.000	2 Unit	500.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	536.300.601	2 Unit	200.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	100%	2.237.708.084	100%	2.237.708.084	100%	2.337.708.084	100%	2.337.708.084	100%	2.337.708.084	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	743.027.099	12 Laporan	743.027.099	12 Laporan	843.027.099	12 Laporan	843.027.099	12 Laporan	843.027.099	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	1.494.680.985	12 Laporan	1.494.680.985	12 Laporan	1.494.680.985	12 Laporan	1.494.680.985	12 Laporan	1.494.680.985	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	100%	100%	833.477.802	100%	1.066.080.382	100%	1.103.295.668	100%	1.084.650.729	100%	1.084.650.729	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pintu Kota Semarang												
2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	39.910.050	1 Unit	39.910.050	1 Unit	39.910.050	1 Unit	39.910.050	1 Unit	39.910.050	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	33 Unit	350.000.000	33 Unit	350.000.000	33 Unit	350.000.000	33 Unit	350.000.000	33 Unit	350.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	150 Unit	10 Unit	6.862.731	10 Unit	6.862.731	10 Unit	6.862.731	10 Unit	6.862.731	10 Unit	6.862.731	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	15 Unit	200.000.000	15 Unit	400.000.000	15 Unit	400.000.000	15 Unit	400.000.000	15 Unit	400.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	1 Unit	236.705.023	1 Unit	269.307.601	1 Unit	306.522.888	1 Unit	287.877.950	1 Unit	287.877.950	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP yang mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SETIAP TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	0,38%	0,75%	1,50%	2,25%	3%	3,75%	
2	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)	Rupiah	9.900.000.000.000	9.974.250.000.000	10.123.863.000.000	10.351.650.000.000	10.662.200.000.000	11.062.032.000.000	

DPMPTSP Kota Semarang menetapkan target kinerja kunci 2025–2030 yang mencakup pertumbuhan nilai investasi, realisasi penanaman modal, dan kualitas pelayanan perizinan. Pertumbuhan investasi direncanakan naik dari 0,38% pada 2025 menjadi 3,75% pada 2030, dengan realisasi penanaman modal meningkat dari Rp9,9 triliun menjadi lebih dari Rp11 triliun. Jumlah investor nasional juga ditargetkan tumbuh dari 595 menjadi 853 dalam periode yang sama.

Untuk menjamin kepastian dan mutu layanan, indikator Persentase Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan (SP) ditetapkan sebesar 98,50% pada 2025 dan ditingkatkan hingga 99,85% pada 2030. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan guna memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan, DPMPTSP menetapkan indikator kinerja utama yang terukur dan realistis untuk dicapai pada periode 2025–2030. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan nilai investasi.

Pertumbuhan nilai investasi daerah ditargetkan meningkat secara progresif dari 0,38% pada tahun 2025 menjadi 3,75% pada akhir periode Renstra. Kenaikan ini diharapkan terwujud melalui penguatan promosi potensi daerah, penyederhanaan proses perizinan, dan optimalisasi layanan berbasis digital. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, realisasi penanaman modal baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) diproyeksikan meningkat dari Rp9,9 triliun pada tahun 2025 menjadi lebih dari Rp11 triliun pada tahun 2030.

Pencapaian seluruh target ini akan didukung oleh pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang terintegrasi, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk memperluas akses dan mempercepat pelayanan penanaman modal. Dengan demikian, diharapkan investasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang inklusif, kompetitif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	595	647	698	750	801	853	
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,38%	0,75%	1,50%	2,25%	3%	3,75%	
3	Nilai Investasi	Rupiah	9.900.000.000.000	9.974.250.000.000	10.123.863.000.000	10.351.650.000.000	10.662.200.000.000	11.062.032.000.000	
4	Persentase Jumlah Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	98,50	98,77	99,04	99,31	99,58	99,85	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Permasalahan dalam urusan penanaman modal sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan penanaman modal dan perizinan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

21. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia khususnya bidang kepemudaan dan keolahragaan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Rancangan akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulian

Rancangan akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kota Semarang Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Olahraga, dan UPTD;
b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Olahraga, dan UPTD;
d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
e. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Olahraga dan UPTD;
f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Olahraga, dan UPTD;
h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pembinaan prestasi olahraga, Bidang Pengembangan pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Olahraga, dan UPTD;
i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

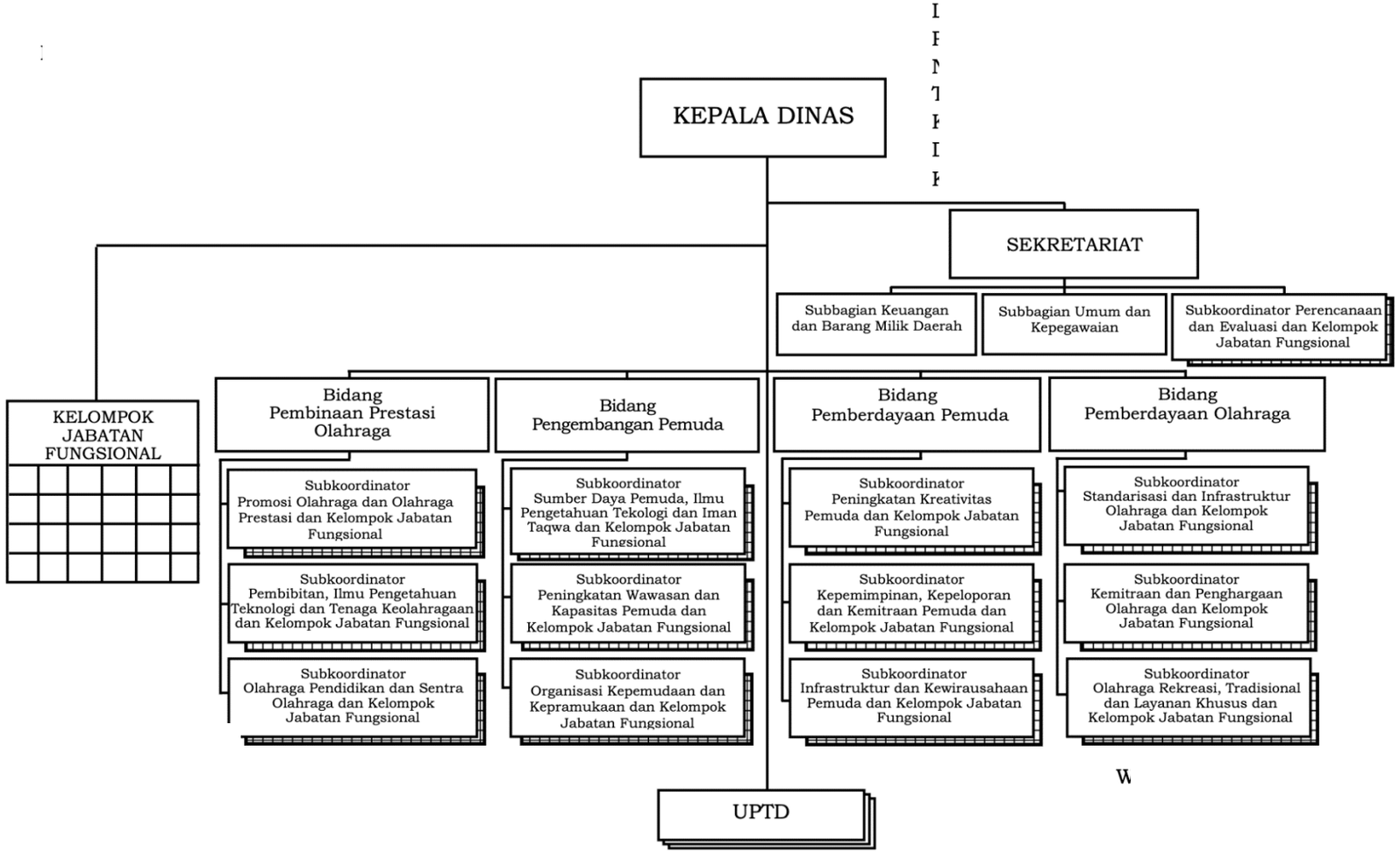

Sumber: Perwalkot Semarang Nomor 110 Tahun 2021

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana penjelasan di atas, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas:

   1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan

   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga;

d. Bidang Pengembangan Pemuda;

e. Bidang Pemberdayaan Pemuda;

f. Bidang Pemberdayaan Olahraga;

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional

Adapun dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang struktur organisasi UPTD Gelanggang Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

Struktur Organisasi UPTD Gelanggang Olahraga
pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

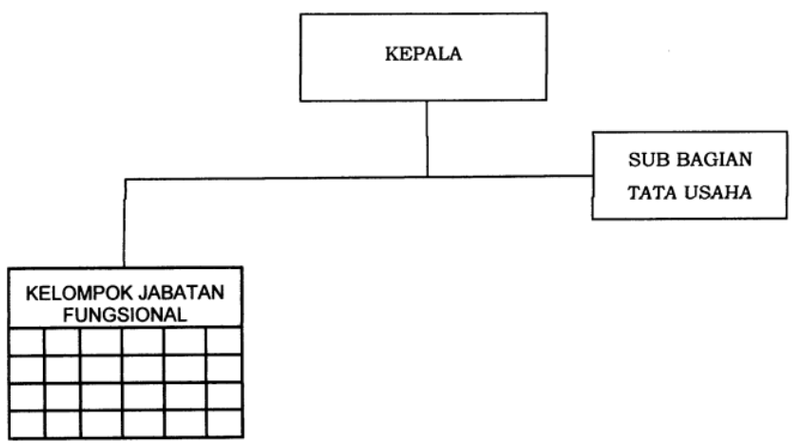

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang uraian tugas jabatan struktural Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

2. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Pemberdayaan Olahraga, dan UPTD. Sekretaris diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Olahraga, dan UPTD;
d. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pemberdayaan Olahraga, dan UPTD;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kesekretariatan Dinas;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Dinas;
h. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
j. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
m. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
n. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
p. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
r. pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
s. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
t. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;

u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
v. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
w. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pePra Rancangan produk hukum Dinas;
x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
z. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, yang mempunyai tugas:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
   f. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
   g. menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah lingkungan Dinas;
   h. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
   i. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
   j. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Dinas;
   k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   l. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
   m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   e. menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
   f. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;

g. menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
h. menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
i. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
j. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi pePra Rancangan produk hukum Dinas;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
q. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Dinas;
f. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
g. menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
i. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
j. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
k. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;

l. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional bersangkutan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga

Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan, dan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga;
e. pelaksanaan kegiatan inventarisasi, penyajian data dan informasi industri olahraga;
f. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi manajemen industri olahraga;
g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran olahraga;
h. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis promosi dan pemasaran olahraga;
i. pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisis promosi dan pemasaran olahraga;
j. pelaksanaan kegiatan pelatihan olahraga prestasi;
k. pelaksanaan kegiatan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi;
l. pelaksanaan kegiatan tata kelola kontingen olahraga;
m. pelaksanaan kegiatan pengembangan atlet andalan; n
n. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembagan olahraga prestasi;
o. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembagan olahraga unggulan;
p. pelaksanaan kegiatan pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
q. pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga usia muda;
r. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga;
s. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelatih dan instruktur, wasit, juri dan tenaga pendukung;
t. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan organisasi keolahragaan;
u. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kompetisi olahraga pelajar;
v. pelaksanaan kegiatan supervisi, pemantauan dan bimbingan teknis pengelolan dan pengembangan sentra dan perkumpulan olahraga;
w. pelaksanaan kegiatan supervisi, pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan sekolah khusus olahraga;
x. pelaksanaan kegiatan supervisi, pemantauan dan bimbingan teknis Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah;
y. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar; pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga;
z. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga;

aa. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga; dan
bb. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, terdiri atas:
1. Ketua Tim Kerja Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, yang mempunyai tugas diantaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
   e. menyiapkan kegiatan inventarisasi, penyajian data dan informasi industri olahraga;
   f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi manajemen industri olahraga;
   g. menyiapkan kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran olahraga;
   h. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis promosi dan pemasaran olahraga;
   i. menyiapkan kegiatan pemantauan, dan analisis promosi dan pemasaran olahraga;
   j. menyiapkan kegiatan pelatihan olahraga prestasi;
   k. menyiapkan kegiatan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi;
   l. menyiapkan kegiatan tata kelola kontingen olahraga;
   m. menyiapkan kegiatan pengembangan atlet andalan;
   n. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembagan olahraga prestasi;
   o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembagan olahraga unggulan;
   p. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
   q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
   r. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
   s. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Ketua Tim Kerja Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan yang mempunyai tugas diantaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;

e. menyiapkan kegiatan pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
f. menyiapkan kegiatan kompetisi olahraga usia muda;
g. menyiapkan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga;
h. menyiapkan kegiatan peningkatan mutu pelatih dan instruktur, wasit, juri dan tenaga pendukung;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan organisasi keolahragaan;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
l. menyiapkan monitoring evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
m. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketua Tim Kerja Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga yang mempunyai tugas diantaranya:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
e. menyiapkan kegiatan pembinaan dan kompetisi olahraga pelajar;
f. menyiapkan kegiatan supervisi, pemantauan dan bimbingan teknis pengelolan dan pengembangan sentra dan perkumpulan olahraga;
g. menyiapkan kegiatan supervisi, pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan sekolah khusus olahraga;
h. menyiapkan kegiatan supervisi, pemantauan dan bimbingan teknis Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah;
i. menyiapkan kegiatan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
l. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
m. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Pemuda

Bidang Pengembangan Pemuda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas terkait Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda, dan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pengembangan Pemuda;
e. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga kepemudaan formal, tenaga kepemudaan informal dan tenaga kepemudaan layanan khusus;
f. pelaksanaan kegiatan pemetaan dan penelusuran ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan;
g. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan;
h. pelaksanaan kegiatan penghayatan dan pengamalan keimanan ketaqwaan kepemudaan;
i. pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan pemuda bidang politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif;
j. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda bidang pariwisata, kemaritiman, kemandirian ekonomi, pemahaman industri kecil, kedaulatan pangan, energi dan lingkungan hidup;
k. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi pelajar, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan;
l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka;
m. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana pramuka;
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pengembangan Pemuda;
o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pengembangan Pemuda;
p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Pemuda; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas:

1. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa, yang mempunyai tugas diantaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait; menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa;
   d. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga kepemudaan formal, tenaga kepemudaan informal dan tenaga kepemudaan layanan khusus;

e. menyiapkan kegiatan pemetaan dan penelusuran ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan;
f. menyiapkan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan;
g. menyiapkan kegiatan penghayatan dan pengamalan keimanan ketaqwaan kepemudaan;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Imam Taqwa;
i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa;
j. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa;
k. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketua Tim Kerja Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda, yang mempunyai tugas diantaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait; menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
   d. menyiapkan kegiatan pengembangan wawasan pemuda bidang politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif; menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda bidang pariwisata, kemaritiman, kemandirian ekonomi, pemahaman industri kecil, kedaulatan pangan, energi dan lingkungan hidup;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
   f. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
   g. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
   h. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketua Tim Kerja Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, yang mempunyai tugas diantaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait; menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
   d. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi pelajar, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan;

e. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana pramuka;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
h. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
i. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
j. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Pemuda

Bidang Pemberdayaan Pemuda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda, dan Infrastruktur dan Kewiraausahaan Pemuda. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda;
e. pelaksanaan kegiatan peningkatan kreativitas pemuda;
f. pelaksanaan kegiatan publikasi kreativitas pemuda;
g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kaderisasi kepemimpinan pemuda;
h. pelaksanaan kegiatan pendayagunaan kepemimpinan pemuda;
i. pelaksanaan kegiatan kepeloporan pemuda tanggap bencana;
j. pelaksanaan kegiatan kepeloporan pemuda rawan sosial;
k. pelaksanaan kegiatan kemitraan pemuda dengan pemerintah dan atau swasta;
l. pelaksanaan kegiatan promosi dan penghargaan kepemudaan;
m. pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan;
n. pelaksanaan kegiatan supervisi dan pemantauan standarisasi prasarana dan sarana kepemudaan;
o. pelaksanaan kegiatan kewirausahaan pemuda; penelusuran dan pemetaan potensi;
p. pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi kewirausahaan pemuda;
q. pelaksanaan kegiatan pengembangan akses permodalan bagi pemuda;
r. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
s. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang Pemberdayaan Pemuda;
t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud,terdiri atas:

1. Ketua Tim Kerja Peningkatan Kreativitas Pemuda, yang mempunyai tugas diantaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Peningkatan Kreativitas Pemuda;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda;
   e. menyiapkan kegiatan peningkatan kreativitas pemuda;
   f. menyiapkan kegiatan publikasi kreativitas pemuda;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
   h. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Peningkatan Kreativitas Pemuda;
   i. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kreativitas Pemuda;
   j. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Ketua Tim Kerja Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda, yang mempunyai tugas diantaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
   e. menyiapkan kegiatan fasilitasi kaderisasi kepemimpinan pemuda;
   f. menyiapkan kegiatan pendayagunaan kepemimpinan pemuda;
   g. menyiapkan kegiatan kepeloporan pemuda tanggap bencana;
   h. menyiapkan kegiatan kepeloporan pemuda rawan sosial;
   i. menyiapkan kegiatan kemitraan pemuda dengan pemerintah dan atau swasta;
   j. menyiapkan kegiatan promosi dan penghargaan kepemudaan;
   k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
   l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
   m. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
   n. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketua Tim Kerja Infrastruktur dan Kewiraausahaan Pemuda, yang mempunyai tugas diantaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Infrastruktur dan Kewiraausahaan Pemuda;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Infrastruktur dan Kewiraausahaan Pemuda;
   e. menyiapkan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan;
   f. menyiapkan kegiatan supervisi dan pemantauan standarisasi prasarana dan sarana kepemudaan;
   g. menyiapkan kegiatan penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda;
   h. menyiapkan kegiatan pengembangan potensi kewirausahaan pemuda;
   i. menyiapkan kegiatan pengembangan akses permodalan bagi pemuda;
   j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Infrastruktur dan Kewiraausahaan Pemuda;
   k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Infrastruktur dan Kewiraausahaan Pemuda;
   l. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
   m. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemberdayaan Olahraga

Bidang Pemberdayaan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemberdayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pemberdayaan Olahraga;
e. pelaksanaan kegiatan supervisi dan pemantauan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan prasarana olahraga;
f. pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana olahraga prestasi, olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan olahraga pendidikan;
g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kemitraan pelaku usaha dengan pelaku olahraga profesional;
h. pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelenggaraan penghargaan olahraga;
i. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengembangan karier atlet;
j. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan olahraga massal dan kesehatan keluarga;
k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan sanggar dan pusat kebugaran;

l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan olahraga petualangan, tantangan dan wisata;
m. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan ruang publik olahraga;
n. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengelolaan olahraga tradisional;
o. pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga usia dini dan lanjut usia;
p. pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga khusus;
q. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kompetisi olahraga penyandang cacat;
r. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Olahraga;
s. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemberdayaan Olahraga;
t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Olahraga; dan
u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Olahraga, terdiri atas:
1. Ketua Tim Kerja Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga, yang mempunyai tugas daintaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
   e. menyiapkan kegiatan supervisi dan pemantauan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan prasarana olahraga;
   f. menyiapkan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana olahraga prestasi, olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan olahraga pendidikan;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
   h. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
   i. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, yang mempunyai tugas daintaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
   e. menyiapkan kegiatan fasilitasi kemitraan pelaku usaha dengan pelaku olahraga profesional;

f. menyiapkan kegiatan penelusuran dan penyelenggaraan penghargaan olahraga;
g. menyiapkan kegiatan bimbingan dan pengembangan karier atlet;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
j. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
k. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketua Tim Kerja Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus, yang mempunyai tugas daintaranya:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Olahraga Rekreasi , Tradisional dan Layanan Khusus;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
   e. menyiapkan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan olahraga massal dan kesehatan keluarga;
   f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan sanggar dan pusat kebugaran;
   g. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan olahraga petualangan, tantangan dan wisata;
   h. menyiapkan kegiatan pengkajian dan pengembangan ruang publik olahraga;
   i. menyiapkan kegiatan pengkajian dan pengelolaan olahraga tradisional;
   j. menyiapkan kegiatan pengembangan olahraga usia dini dan lanjut usia;
   k. menyiapkan kegiatan pengembangan olahraga khusus;
   l. menyiapkan kegiatan pembinaan dan kompetisi olahraga penyandang cacat;
   m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
   n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
   o. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
   p. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 118) dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gelanggang Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. UPTD Gelanggang Olahraga adalah unsur pelaksana tugas teknis

pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. UPTD Gelanggang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga meliputi pengelolaan Gelanggang Olahraga. UPTD Gelanggang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Susunan Organisasi UPTD Gelanggang Olahraga, terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Jabatan Fungsional;

Untuk melaksanakan tugasnya UPTD Gelanggang Olahraga mempunyai fungsi diantaranya:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas persetujuan pimpinan;
g. pelaksanaan penyusunan pedoman pengelolaan Gelanggang Olahraga;
h. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Gelanggang Olahraga;
i. pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olahraga, penginapan, sewa gedung dan fasilitas lain dilingkungan UPTD Gelanggang Olahraga;
j. pelaksanaan pelayanan kegiatan olahraga, pemuda, pelajar dan mahasiswa serta masyarakat di lingkungan UPTD Gelanggang Olahraga;
k. pelaksanaan fasilitasi perijinan pemanfaatan UPTD Gelanggang Olahraga;
l. pelaksanaan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana UPTD Gelanggang Olahraga;
m. pelaksanaan pengelolaan operasional kegiatan UPTD Gelanggang Olahraga;
n. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan rutin sarana dan prasarana serta fasilitas lain di lingkungan UPTD Gelanggang Olahraga;
o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana dibidang pengelolaan Gelanggang Olahraga;
p. penyelenggaran keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan UPTD Gelanggang Olahraga;
q. pelaksanaan kegiatan promosi Gelanggang Olahraga;
r. pelaksanaan penarikan retribusi dan/atau pendapatan lain yang sah yang berkaitan dengan operasional UPTD Gelanggang Olahraga untuk disetor ke Kas Daerah;
s. pelaksanaan pemeliharaan prasaran dan sarana UPTD Gelanggang Olahraga;
t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Gelanggang Olahraga;
u. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Gelanggang Olahraga;
v. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Gelanggang Olahraga;
w. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Gelanggang Olahraga;
x. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

z. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi diantaranya:

a. penyiapan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
b. penyiapan kegiatan penyusunan kebijakan di UPTD Gelanggang Olahraga;
c. Penyiapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Gelanggang Olahraga;
d. penyiapan kegiatan pembagian tugas kepada bawahan;
e. penyiapan kegiatan bimbingan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
f. penyiapan kegiatan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
g. penyiapan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
h. penyiapan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
i. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD Gelanggang Olahraga;
j. penyiapan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPTD Gelanggang Olahraga;
k. penyiapan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD Gelanggang Olahraga;
l. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
m. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD Gelanggang Olahraga;
n. penyiapan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
o. penyiapan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
p. penyiapan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPTD Gelanggang Olahraga;
q. penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPTD Gelanggang Olahraga;
r. penyiapan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
s. penyiapankegiatan monitoring danevaluasi program dan kegiatan;
t. penyiapan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
u. penyiapan kegiatan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang undangan. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku. Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dapat menjalankan tugasnya bekerja kerja/kelompok secara individu/mandiri dan/atau tim. Pelaksanaan tugas dalam tim kerja/kelompok berdasarkan penunjukan Kepala Perangkat Daerah sesuai kompetensi Pejabat Fungsional. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, penunjukan Pejabat Fungsional dapat berasal dari internal dan/atau eksternal perangkat daerah. Mekanisme penunjukan, pemindahan dan pemberhentian pejabat fungsional selaku Ketua Tim Kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam Tabel dibawah ini. adapun Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Perangkat Daerah Dispora Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	10	4	6
2	S-1	20	15	5
3	D-IV	0	0	0
4	D-III	6	1	5
5	SMA	9	9	0
6	SMP	1	1	0
7	SD	1	1	0
Total		**47**	**31**	**16**

Sumber: Data Kepegawaian Sub Bagian Umpeg Dispora Kota Semarang 2025

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Perangkat Daerah Dispora Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	0	0	0
2	S-1	8	5	3
3	D-IV	0	0	0
4	D-III	0	0	0

No	Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
5	SMA	2	2	0
6	SMP	0	0	0
7	SD	0	0	0
Total		**10**	**7**	**3**

Sumber: Data Kepegawaian Sub Bagian Umpeg Dispora Kota Semarang 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 57 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan
pada Dispora Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	II/b	2	2	0
2	II/c	6	3	3
3	II/d	1	1	0
4	III/a	10	8	2
5	III/b	6	4	2
6	III/c	8	6	2
7	III/d	9	4	5
8	IV/a	4	2	2
9	IV/c	1	1	0
Total		**47**	**31**	**16**

Sumber: Data Kepegawaian Sub Bagian Umpeg Dispora Kota Semarang 2025

Grafik 2.1
Komposisi Pegawai PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga
berdasarkan Golongan

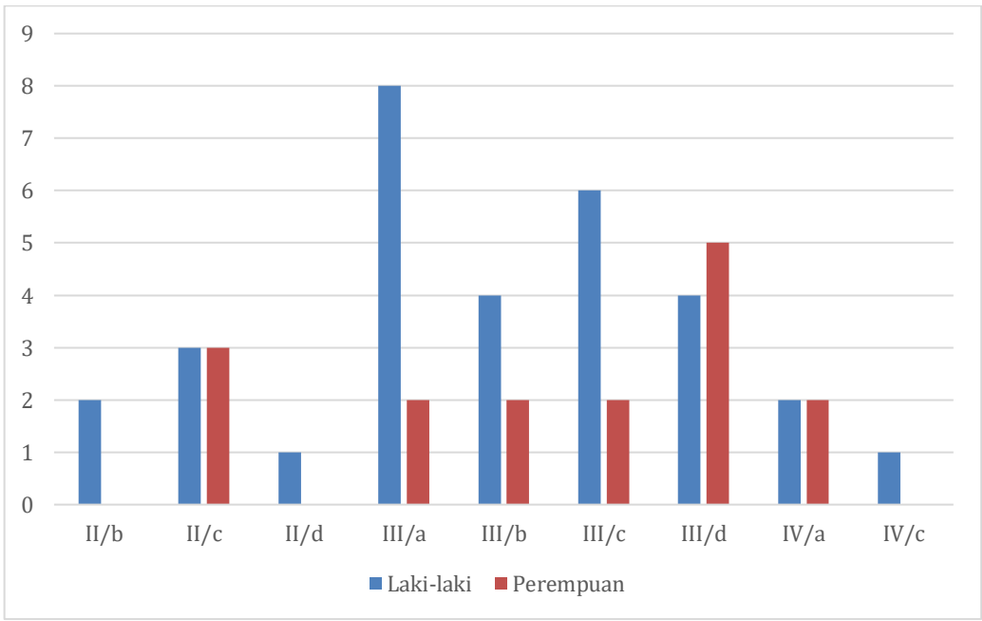

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PPPK Berdasarkan Golongan
Pada Dispora Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	I	0	0	0
2	IV	0	0	0
3	V	2	2	0
4	VI	0	0	0
5	VII	0	0	0
6	IX	8	5	3
7	X	0	0	0
8	XI	0	0	0
Total		**10**	**7**	**3**

Sumber: Data Kepegawaian Sub Bagian Umpeg Dispora Kota Semarang 2025

Grafik 2.2
Komposisi Pegawai PPPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga
berdasarkan Golongan

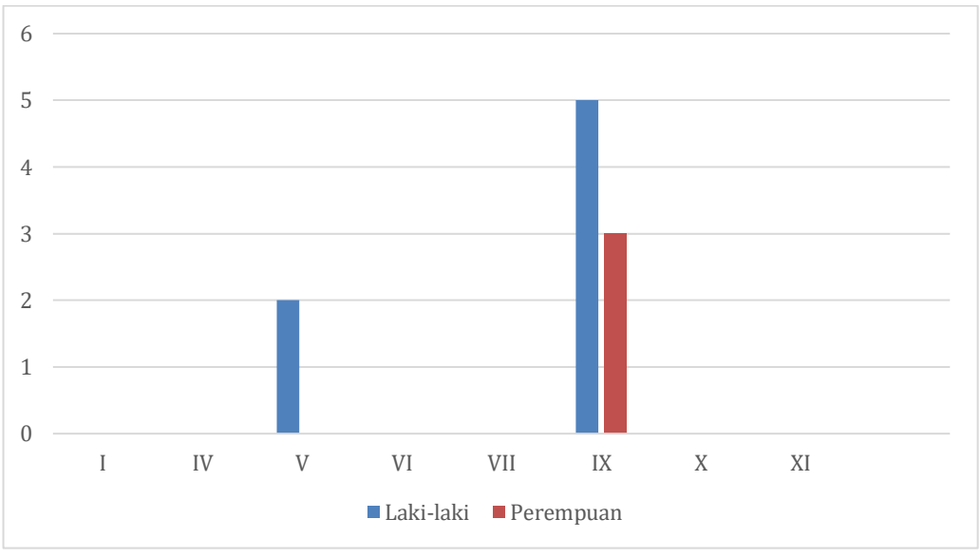

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kepemudaan dan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Aset Tanah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp.)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah Lapangan Sepak Bola	13690	2006	Jl. Krakatau Kel.karang Tempel Kec. Semarang Timur		7/27/2006	16			517.350.000	
2.	Tanah Lapangan Tenis	1874	2007	Jl. Tambora Kel.Tegalsari Kec.Candisari Semarang		4/20/2007	20			3.918.000	
3.	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Lainnya (dst)	43261	2005	JL. Trilombajuang No.7 Semarang		11/29/2010	11.01.11.04.4.00028			5.922.000.000	
4.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22560	1997	Jl. Taman Majapahit No. 1 Kelurahan Pedurungan Lor Semarang						33.388.800.000	
5.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1725	1984	Jl. Pamularsih Raya No. 20						67.010.000	
6.	Tanah Lapangan Sepak Bola	14998	1971	Jl. Citarum Kel.Bugangan Kec.Semarang Timur						1.492.600	

Tabel 2.6
Gedung dan Bangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp.)
1.	Lapangan Sepak Bola Sidodadi	B	13.690	Jl. Krakatau Kel. Karang Tempel, Semarang Timur	358.711	Pemkot Semarang	Pembelian	2.498.090.424
2.	Lapangan Tenis Tambora	B	1.874	Jl. Tambora, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari	3.480	Pemkot Semarang	Pembelian	744.578.125
3.	GOR Tri Lomba Juang	B	43.261	Jl. Tri Lomba Juang No. 7, Semarang	17.682	Pemkot Semarang	Pembelian	5.922.000.000
4.	GOR Manunggal Jati	KB	22.560	Jl. Taman Majapahit, Kel. Pedurungan Lor, Semarang		Pemkot Semarang	Pembelian	33.388.800.000
5.	Kantor DISPORA	B	1.725	Jl. Pamularsih Raya No. 20, Semarang	1.379	Pemkot Semarang	Pembelian	3.126.992.360
6.	Stadion Sepakbola Citarum	KB	14.998	Jl. Citarum Kel. Bugangan, Kec. Semarang Timur	3.327	Pemkot Semarang	Pembelian	7.696.043.362
7.	Sirkuit Mijen	RB	99.805	Jl. Raya Semarang – Mijen, Kel. Tambangan, Kec. Mijen	99.974	Pemkot Semarang	Pembelian	59.243.089.221
8.	Sport Center	RB	2.198	Jl. Kalisasak RT.03/RW. 03, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu	1.350	Kel. Mangkang Wetan	Pembelian	8.630.874.518
9.	Gedung Serbaguna	KB	1.399	Jl. Gunung Talang, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur	1.089	Dinas Lingkungan Hidup	Pembelian	6.465.176.199

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

a. Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Indikator Tujuan dan Sasaran																		
	Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	**Jumlah**	**-**	**-**	**58**	**58**	**71**	**71**	**73**	**58**	**58**	**71**	**71**	**73**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Persen	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persen	8.92	-	8,92	10,35	12,21	9,81	11,46	NA	9,36	21,67	21,67	12,54	NA	105	177	220	109.4
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persen	0.60	-	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	100	100	100	100	100
	Nilai AKIP Dispora	Nilai	74	-	NA	72.3	72.6	74.05	76.61	NA	NA	68.11	72.3	72.6	NA	NA	93.81	97.63	94.76
2.	Indikator kinerja kunci																		
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	37	-	10	38	188	188	213	37	114	119	367	270	370	300	63.29	195.2	126.7
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	-	-	0.93	0.94	0.94	0.95	0.96	0.93	0.94	0.94	0.95	0.96	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	-	-	0.035	0.04	0.04	0.043	0.043	0.035	0.04	0.04	0.043	0.043	100	100	100	100	100

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota Semarang

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**5.618.882.000**	**13.654.744.985**	**13.354.813.192**	**15.203.836.480**	**15.663.202.715**	**5.480.174.078**	**13.188.138.079**	**12.469.741.057**	**14.745.830.685**	**15.158.232.554**	**97,53**	**96,58**	**93,37**	**96,99**	**96,78**	**4,89%**	**5,20%**
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		148.867.811	38.318.938	40.238.172	41.000.000		108.122.000	33.976.308	35.118.450	38.383.560		72,63	88,67	87,3	98,62	-22,45%	-18,64%
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.911.986.309	9.697.218.127	8.541.312.169	9.050.576.000		10.840.124.309	9.130.296.079	8.389.722.342	8.871.597.095		99,34	94,15	98,2	98,02	-5,70%	-6,05%
1,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.141.927.553	1.249.072.170	1.099.927.536	1.453.071.814		932.536.070	1.080.522.744	982.223.952	1.392.585.017		81,66	86,51	89,3	95,84	9,85%	16,18%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1,4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		0	0	75.904.240	90.000.000		0	0	74.104.700	85.467.225		0	0	97,6	94,96	6,19%	5,11%
1,5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	109.391.759	0		0	0	86.060.000	0		0	0	78,7	-	-33,33%	-33,33%
1,6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		147.497.250	425.137.330	2.075.890.698	204.086.694		144.512.500	413.181.040	2.021.203.500	194.978.400		97,98	97,19	97,4	95,54	162,12%	161,58%
1,7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		685.184.635	743.310.071	796.576.151	862.973.266		651.930.437	698.939.564	729.039.969	792.624.019		95,15	94,03	91,5	91,85	7,99%	6,75%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		479.289.000	1.201.756.556	2.464.595.755	3.961.494.941		452.212.763	1.112.825.322	2.428.357.772	3.782.597.238		94,35	92,60	98,5	95,48	105,52%	106,69%
1,9	Penataan Organisasi		139.992.427	0	0	0		58.700.000	0	0	0		41,93	0	0	0	-33,33%	-33,33%
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**238.833.000**	**3.612.816.949**	**1.985.845.990**	**3.162.515.947**	**3.253.512.000**	**238.833.000**	**3.348.877.356**	**1.931.739.960**	**3.095.347.067**	**2.990.569.315**	**100**	**92,69**	**97,28**	**97,88**	**91,92**	**5,70%**	**4,84%**
2,1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor		728.080.740	1.102.239.474	2.189.316.820	1.426.512.000		613.501.156	1.055.472.735	2.126.972.067	1.321.546.625		84,26	95,76	97,2	91,92	38,39%	45,23%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
	Kabupaten/Kota, Wirausaha Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																	
2,2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.884.736.209	883.606.516	973.199.127	1.827.000.000		2.735.376.200	876.267.225	968.375.000	1.669.022.690		94,82	99,17	99,5	91,35	9,50%	4,97%
3	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**2.804.278.000**	**23.007.484.375**	**35.034.709.032**	**57.613.520.036**	**41.155.613.965**	**2.802.032.640**	**20.976.121.466**	**31.970.547.340**	**55.616.866.492**	**34.415.943.161**	**99,91**	**91,17**	**91,25**	**96,5**	**83,62**	**29,39 %**	**29,42 %**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
3,1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3.997.369.037	4.330.729.950	4.716.734.819	5.352.284.735		3.791.814.027	4.109.267.441	4.627.717.219	5.069.811.006		94,86	94,89	98,1	94,72	10,24 %	10,18 %
3,2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		17.428.136.178	1.898.080.082	25.054.478.941	3.756.050.000		15.902.294.789	1.765.884.632	24.259.642.230	3.169.766.861		91,24	93,04	96,8	84,39	348,62 %	365,99 %
3,3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		904.268.386	28.013.336.000	27.271.257.000	5.750.247.270		628.470.600	25.399.797.470	26.181.280.800	5.535.870.184		69,50	90,67	96,0	96,27	972,11 %	1288,58%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
3,4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		157.984.709	0	0	24.000.000.000		140.987.800	0	0	18.494.733.310		89,24	-	-	77,06	-33,33%	-33,33%
3,5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		519.726.065	792.563.000	571.049.276	2.297.031.960		512.554.250	695.597.797	548.226.243	2.145.761.800		98,62	87,77	96,0	93,41	108,93%	101,98%
4	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**0**	**0**	**2.170.083.000**	**2.000.000.000**	**2.400.000.000**		**0**	**2.166.883.000**	**2.000.000.000**	**2.400.000.000**		**0**	**99,85**	**100,0**	**100,0**	**4,05%**	**4,10%**
4,1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		0	2.170.083.000	2.000.000.000	2.400.000.000		0	2.166.883.000	2.000.000.000	2.400.000.000		0	99,85	100,0	100,0	4,05%	4,10%

c. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dalam melakukan Tugasnya juga selalu berkordinasi dengan mitra dan juga *Stokeholder* di antaranya :

1) KONI

Hubungan antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) merupakan hubungan kemitraan strategis dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di tingkat daerah maupun nasional. Dispora bertindak sebagai fasilitator dan pendukung kebijakan, sedangkan KONI adalah pelaksana teknis pembinaan olahraga prestasi. Keduanya harus berkoordinasi erat untuk meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga di tingkat daerah dan nasional. KONI bukan bagian dari struktur pemerintahan, tetapi merupakan mitra resmi pemerintah daerah (dalam hal ini Dispora). Dispora sebagai *user* anggaran daerah bertanggung jawab atas akuntabilitas dana yang disalurkan ke KONI. KONI wajib mempertanggungjawabkan hibah dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada Dispora dan BPK.

2) KORMI

Hubungan antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dan KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) adalah hubungan kemitraan strategis dalam pengembangan olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi, yang berbeda dari peran KONI (yang fokus pada olahraga prestasi). Dispora dan KORMI adalah mitra penting dalam memajukan olahraga masyarakat. Dispora mendukung dari sisi kebijakan, anggaran, dan fasilitasi. KORMI bertindak sebagai pelaksana lapangan melalui berbagai inorga dan komunitas. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat sehat, bugar, dan aktif secara menyenangkan bukan untuk prestasi, tapi untuk gaya hidup.

3) NPCI

Hubungan antara Dispora (Dinas Kepemudaan dan Olahraga) dan NPC *(National Paralympic Committee*) merupakan kemitraan strategis dalam pengembangan olahraga disabilitas (olahraga paralimpik). Kolaborasi ini penting untuk menjamin inklusi, kesetaraan, dan pemberdayaan atlet disabilitas melalui pembinaan dan kompetisi. Dispora dan NPC memiliki hubungan kemitraan yang saling melengkapi, terutama dalam mewujudkan olahraga yang inklusif dan berkeadilan. Dispora bertugas menyediakan dukungan regulasi, pendanaan, dan fasilitasi, sedangkan NPC bertugas sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi disabilitas. Kemitraan ini berperan penting dalam:

- Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di bidang olahraga
- Mengembangkan prestasi atlet paralimpik daerah
- Menyediakan sarana yang inklusif dan ramah disabilitas

Adapun Tabel hubungan antara Dispora, KONI, KORMI, NPCI adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Aspek	NPC	KONI	KORMI
Fokus	Atlet disabilitas	Atlet prestasi umum	Masyarakat umum & rekreasi
Tujuan	Prestasi olahraga difabel	Prestasi kompetitif	Gaya hidup sehat & budaya

Aspek	NPC	KONI	KORMI
Event Utama	Peparnas, Peparprov	PON, Porprov	FORNAS, FORDA
Basis Organisasi	Disabilitas	Cabor	Inorga/komunitas

4) Hubungan antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dan Gerakan Pramuka (biasanya melalui Kwartir Cabang/Daerah/Kwartir Nasional) adalah hubungan kemitraan strategis dalam bidang pembinaan generasi muda**,** khususnya dalam pengembangan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan bela negara**.** Dispora dan Gerakan Pramuka adalah mitra strategis dalam pembinaan pemuda di Indonesia. Dispora berperan sebagai fasilitator dan pendukung kebijakan serta anggaran, sementara Gerakan Pramuka bertindak sebagai pelaksana program pendidikan karakter berbasis kepramukaan. Keduanya bersinergi dalam membentuk generasi muda yang tangguh, nasionalis, dan berdaya saing. Adapun Tujuan Bersama antara Dispora dan Pramuka adalah:
   a. Membentuk pemuda yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab
   b. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air
   c. Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah
   d. Menyediakan wadah positif bagi remaja dan pemuda untuk belajar dan berkontribusi

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja PD

Dalam berjalannya Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, Dispora hanya mengandalkan anggaran APBD kota Semarang dan juga kerja sama denga CSR.

e. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkordinasi dengan Stoke Holder, Adapun kerja sama Antara Dispora dengan Pihak Swasta diantaranya adalah kerja sama dengan PT. KOMPAS terkait Event Tahunan Semarang10 K. Kegiatan ini sudah berlangsung selama hampir 5 tahun. Tahun Tahun kedepan Dispora Kota Semarang dalam melakukan Kegiatan keolahragaan ataupun Kepemudaaan akan berusaha mencari CSR dari swasta untuk peningkatan Kegiatan dan juga tidak hanya mengandalkan APBD.

f. Inovasi Perangkat Daerah

1) Kelas Khusus Olahraga (KKO)

Kegiatan Inovasi yang telah dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah Kegiatan Kelas Khusus Olahraga. Kelas Khusus Olahraga (KKO) berdiri Tahun 2023, dimana kegiatan ini ditujukan untuk Peningkatan Atlet Usia dini yang sasarannya adalah Atlet SMP. KKO ini adalah central kegiatan Olahraga dimana atlet tersebut akan dibina baik secara Akademik maupun Non Akademik yang berpusat di SMP 3 Semarang. Adapun Cabang Olahraga yg di adakan adalah, Atletik, Pencak Silat, Taekwondo, Renang, Wushu, Panahan, Senam dan Bola Voli. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi awal Peningkatan Prestasi Olahraga Usia Dini. Dalam beberapa Tahun ini dengan adanya KKO tersebut setiap

Event Kejuaraan Pelajar Tingkat Daerah Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang selalu menjadi Juara Umum.

2) Estripora (Elektronik Sistem Retribusi Kepemudaan dan Olahraga) Elektronik Sistem Retribusi Kepemudaan dan Olahraga merupakan layanan yang di sediakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melayani pemesanan, pendataan, penetapan dan pembayaran retribusi pada obyek-obyek tertentu. Tujuan aplikasi Estripora ini yaitu memudahkan pelayanan retribusi, menjangkau masyarakat luas, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi, sehingga dapat tercipta layanan publik sektor pendapatan daerah dari retribusi yang unggul dan baik.

g. Penghargaan Perangkat Daerah

Penghargaan Dispora Kota Semarang dari tahun 2021-2024

1. Juara Umum POPDA tingkat Propinsi (Tahun 2021, 2022, 2024, 2025)
2. Atlet Kota Semarang mendapatkan 6 emas, 15 Perak dan 16 Perunggu dalam ajang event PON 2021 di Papua
3. Atlet Kota semarang menyumbangkan 10 Medali Emas, 34 Medali Perak dan 52 Medali Perunggu dalam PON Aceh dan sumatera Utara
4. Atlet Kota semarang menyumbangkan 12 Medali Emas, 4 Medali Perak dan 11 Medali Perunggu dalam Kejuaraan PEPARNAS di Surakarta
5. Juara PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023
6. Juara 2 Wirausaha Muda berprestasi tingkat Nasional Kategori teknopreuner

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sebagai berikut:

Bidang Kepemudaan

- Partisipasi rendah: Masih banyak anak muda yang belum aktif dalam kegiatan positif seperti organisasi, kewirausahaan, atau kegiatan sosial.
- Isu sosial pemuda: Pengangguran, kenakalan remaja, narkoba, dan pernikahan dini.
- Kesenjangan keterampilan: Banyak pemuda belum memiliki skill sesuai kebutuhan dunia kerja.
- Minimnya wadah kreatif: Fasilitas publik untuk berkarya, berinovasi, dan berjejaring masih terbatas.

Bidang Keolahragaan

- Keterbatasan sarana dan prasarana: Lapangan, stadion, dan fasilitas olahraga belum merata kualitasnya.
- Pembinaan atlet yang belum konsisten**:** Kesinambungan program pembibitan atlet dari tingkat daerah hingga nasional sering terputus.
- Pendanaan terbatas: Terutama untuk cabang olahraga non-populer yang kurang sponsor.

- Kurangnya event kompetitif: Ajang kompetisi masih jarang sehingga motivasi atlet menurun.

Manajerial & Kebijakan

- Koordinasi lintas sektor: Program pemuda dan olahraga sering terfragmentasi antar OPD, lembaga, dan komunitas.
- SDM internal: Pegawai belum semua memiliki kompetensi manajemen olahraga atau pemberdayaan pemuda.
- Digitalisasi belum optimal: Banyak program belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

Bidang Kepemudaan

- Bonus demografi: Jumlah pemuda yang besar dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan inovasi.
- Perkembangan teknologi digital**:** Bisa dimanfaatkan untuk pelatihan online, networking, dan promosi kegiatan.
- Dukungan program nasional: Ada program dari Kemenpora, Kementerian Koperasi, atau BUMN untuk wirausaha muda.
- Kolaborasi dengan komunitas: Banyak komunitas kreatif dan organisasi kepemudaan siap menjadi mitra.

Bidang Keolahragaan

- Potensi prestasi daerah**:** Banyak talenta muda di daerah yang bisa berprestasi jika dibina dengan baik.
- Event olahraga sebagai promosi daerah: Bisa menjadi ajang sport tourism untuk menarik wisatawan.
- Kerjasama swasta: Sponsor dan CSR bisa dilibatkan untuk pembinaan atlet atau pembangunan fasilitas.
- Teknologi sport science: Memungkinkan pembinaan atlet lebih efektif dengan data dan analisis.

Manajerial & Kebijakan

- Digitalisasi layanan: Pendaftaran event, beasiswa, dan pelatihan bisa dilakukan online.
- Pendanaan alternatif: Crowdfunding, sponsorship, dan kerjasama lintas instansi.
- Peningkatan kapasitas SDM: Pelatihan manajemen event, coaching, dan kepemudaan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya bisa dilihata dari Table berikut:

Tabel 2.10
Tantangan dan Peluang Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Bidang	Tantangan	Peluang
Kepemudaan	- Partisipasi pemuda dalam kegiatan positif masih rendah.	- Bonus demografi yang besar.
	- Isu sosial seperti pengangguran, narkoba, kenakalan remaja.	- Perkembangan teknologi digital untuk pelatihan dan networking.
	- Kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan kerja.	- Dukungan program nasional untuk wirausaha muda.
	- Minimnya wadah kreatif dan ruang berkarya.	- Kolaborasi dengan komunitas kreatif dan organisasi pemuda.
Keolahragaan	- Sarana dan prasarana olahraga belum memadai.	- Potensi prestasi atlet daerah yang besar.
	- Pembinaan atlet kurang konsisten.	- Event olahraga dapat menjadi promosi wisata daerah.
	- Pendanaan terbatas, terutama untuk cabang non-populer.	- Kerjasama swasta melalui sponsor dan CSR.
	- Kompetisi dan event olahraga masih jarang.	- Pemanfaatan sport science untuk pembinaan atlet.
Manajerial & Kebijakan	- Koordinasi antar OPD dan stakeholder masih lemah.	- Digitalisasi layanan untuk efisiensi dan transparansi.
	- SDM internal belum semua memiliki kompetensi spesifik.	- Pendanaan alternatif seperti crowdfunding dan kerjasama lintas instansi.
	- Digitalisasi program belum optimal.	- Pelatihan SDM dalam manajemen event, coaching, dan pemberdayaan pemuda.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang: ***"Belum optimalnya partisipasi pembangunan dan daya saing pemuda di Kota Semarang"*** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rumusan Permasalahan

"Belum optimalnya partisipasi pembangunan dan daya saing pemuda di Kota Semarang"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan kegiatan ekonomi mandiri	- Masih terbatasnya Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan - Belum optimalnya kapasitas pemuda
2	Belum Optimalnya Peningkatan pemberdayaan pemuda dalam ekonomi mandiri	- Kurangnya kesadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda terhadap kepeloporan, kewirausahaan, serta kreativitas
3	Belum optimalnya peran pramuka dalam membentuk karakter pemuda	- Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
4	Belum optimalnya pengembangan olahraga prestasi dan rekreasi	- Belum optimalnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang berkualitas - Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan terhadap Organisasi Olahraga - Belum optimalnya mutu standarisasi sarana prasarana olahraga dan pengembangan prestasi atlet usia dini - Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi - Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar
5	Belum optimalnya kualitas dokumen terkait perencanaan, keuangan, dan administrasi kepegawaian	- belum optimalnya Penguatan Data perencanaan dan evaluasi - Kurangnya Penigkatan Kapasitas Kelembagaan - belum optomalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan - belum optimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga - kurangnya pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga - kurang maksimalnya kinerja pelayanan umum dan kepegawaian OPD.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang sesuai dengan lingkunp perangkat Daerah.

1. Fokus Prioritas Strategis Olahraga dalam RPJMN 2025–2029

   Didalam RPJMN 2025-2029 Urusan Pemuda dan Olahraga masuk dalam Konteks RPJMN dan Prioritas Nasional (Prioritas 4), RPJMN 2025–2029 yang diatur melalui Perpres No. 12 Tahun 2025 menempatkan "prestasi olahraga" sebagai bagian dari Prioritas Nasional 4, yang fokus pada penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta peran pemuda dan penyandang disabilitas

2. Kontribusi Kemenpora dalam Pembahasan RPJMN

- Masukan teknokratis dari KONI turut menyumbang dalam menyusun indikator pembangunan olahraga di dalam teknokratik RPJMN 2025–2029. Fokus disoroti terhadap peningkatan partisipasi, penyelenggaraan event, pelatnas dengan pendekatan *sport science*, termasuk gizi dan pelatihan berbasis data ilmiah
- Kemenpora mengusulkan agar KORMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia) — organisasi payung bagi puluhan cabang olahraga masyarakat — diintegrasikan ke dalam RPJMN sebagai upaya penguatan struktur kelembagaan olahraga rakyat

3. Fokus Strategis Kemenpora untuk 2024–2029

Kemenpora telah menetapkan empat bidang prioritas utama:

1. Layanan kepemudaan
2. Prestasi olahraga
3. Kebugaran masyarakat
4. Industri olahraga

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Dalam mencapai visi tersebut, terdapat pokok visi yang akan diwujudkan Kota Semarang di tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1) Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
2) Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
3) Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
4) Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan Olahraga maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dan Pemuda dalam Masyarakat
2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah
3. Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

c. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Perencanaan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat pusat maupun daerah harus saling terintegrasi. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 2020–2024 ditetapkan melalui Permenpora Nomor 8 Tahun 2023 sebagai pedoman pembangunan nasional di bidang pemuda dan olahraga. Di tingkat daerah, Rancangan Akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang 2025–2029 menjadi instrumen perencanaan menengah daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Semarang.

Tabel 2.12

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Kemenpora dengan Rankhir Renstra Dispora

No.	Renstra Kemenpora 2020–2024	Indikator Kemenpora	Renstra Dispora Kota Semarang 2025–2029	Indikator Dispora	Keterkaitan
1	**Tujuan 1:** Mewujudkan pelayanan kepemudaan adaptif, kolaboratif, berkelanjutan, dan berkualitas	- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) - Persentase partisipasi organisasi kepemudaan - Jumlah wirausaha muda	**Tujuan 1:** Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan **Sasaran 1 & 4:** Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan & partisipasi pemuda dalam ekonomi/organisasi sosial	- Persentase kontribusi organisasi kepemudaan (45–65%) - Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi/ekonomi mandiri	Selaras: Kemenpora menekankan daya saing & karakter pemuda nasional, Dispora mengimplementasikan pada skala lokal dengan fokus organisasi & kewirausahaan
2	**Tujuan 2:** Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, serta prestasi olahraga tingkat dunia	- Sport Development Index (SDI) - Persentase masyarakat berolahraga ≥40% - Jumlah medali internasional	**Tujuan 2:** Meningkatkan prestasi olahraga daerah **Sasaran 2:** Peningkatan perolehan medali event olahraga daerah/nasional	- Jumlah medali yang diperoleh (±270–720 per tahun) - Jumlah event olahraga yang diikuti	Selaras: Dispora fokus pada prestasi daerah sebagai basis pembinaan atlet menuju nasional/internasional
3	**Tujuan 3:** Mewujudkan tata kelola kelembagaan	– Nilai SAKIP Kemenpora (minimal BB)	**Tujuan 3:** Meningkatkan kinerja pelayanan kepemudaan &	- Indeks Kinerja Utama (IKU: 72–74) - Indeks	Selaras: Kemenpora menekankan RB & SAKIP, Dispora mengukur dengan

No.	Renstra Kemenpora 2020–2024	Indikator Kemenpora	Renstra Dispora Kota Semarang 2025–2029	Indikator Dispora	Keterkaitan
	Kemenpora yang bersih, akuntabel, dan bermutu	– Indeks Reformasi Birokrasi (≥70) – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ≥85%)	keolahragaan **Sasaran 3:** Meningkatnya kualitas layanan Dispora	Kepuasan Masyarakat Kota Semarang	IKU & kepuasan publik

d. Telaahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Rancangan akhir Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah ***'Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan'***

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembangunan kepemudaan
2. Meningkatnya pembangunan keolahragaan
3. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif
4. Meningkatnya pengeluaran wisatawan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) tidak tercantum secara langsung dalam Perda RTRW karena RTRW mengatur peruntukan dan pola pemanfaatan ruang wilayah dalam jangka panjang, bukan kelembagaan perangkat daerah. Dokumen RTRW memuat arahan fungsi ruang, seperti kawasan olahraga, ruang terbuka publik, atau fasilitas rekreasi, tanpa menetapkan dinas pengelola, karena hal tersebut diatur secara terpisah dalam Perda pembentukan perangkat daerah (SOTK). Keterlibatan Dispora bersifat fungsional melalui pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, namun secara kelembagaan tidak menjadi bagian dari pengaturan dalam perda tata ruang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dispora tidak tercantum secara langsung dalam KLHS karena instrumen KLHS berfokus pada integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program, bukan pada kelembagaan perangkat daerah tertentu. Keterkaitan Dispora hanya bersifat tidak langsung, yaitu melalui program atau kegiatan di sektor kepemudaan dan olahraga yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan. Dalam KLHS, yang dianalisis adalah substansi kegiatan dan dampaknya, bukan nomenklatur dinas pelaksana, sehingga penyebutan Dispora tidak menjadi keharusan secara normatif. Telaahan Dokumen Lainnya

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel 2.13
Isu Perangkat Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Permasalahan dan Isu Strategis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Adanya beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu yang menjangkau dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dari sekolah negeri hingga sekolah swasta.	Belum optimalnya Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan kegiatan ekonomi mandiri	Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Pertumbuhan Kelas Menengah	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pergeseran Struktur Kelas Menengah	Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jatidiri Masyarakat	Terbatasnya kemitraan antar stakeholder kepemudaan
	Belum optimalnya peran pramuka dalam membentuk karakter pemuda					Belum optimalnya SDM kepemudaan yang berdayaguna
	Belum optimalnya pengembangan olahraga prestasi dan rekreasi					Belum optimalnya pembinaan atlit usia dini yang tersentral di tingkat kota
	Belum optimalnya kualitas dokumen terkait perencanaan, keuangan, dan administrasi kepegawaian					Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang dikelola
						Kurangnya ketersediaan data terkait dokumen terkait perencanaan, keuangan, dan administrasi kepegawaian
						belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
						belum optimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2025-2029

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Rancangan akhir Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi pada bidang Kepemudaan dan Olahraga. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan DinasKepemudaan dan Olahraga. Adapun tujuan dan sasaran Kepemudaan dan Olahraga.untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dan Pemuda dalam Masyarakat
2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah
3. Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Partisipasi Olahraga **Sasaran RPJMD yang Relevan**: Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	*"Meningkatnya Kualitas Pemuda dalam Pembangunan"*		Nilai Kualitas Pemberdayaan Pemuda	Angka	85	86	87	88	89	90	
		Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dan Pemuda dalam Masyarakat	Persentase Organisasi Kepemudaan Aktif dan Pemuda Diberdayakan	Persen	45,45%	50,51%	55,56%	60,61%	65,66%	70,71%	
		Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Persentase prestasi olahraga daerah	Persen	24,65%	72,78%	24,65%	27,12%	24,65%	24,65%	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	72	72	73	73	74	74	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	90,91	90,91	91,92	91,92	92,93	93	

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kepemudaan dan Olahraga dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
Penguatan Peran serta Kapasitas Organisasi Kepemudaan dan komunitas	Integrasi organisasi kepemudaan ke dalam forum bersama	Kolaborasi organisasi kepemudaan dengan sektor swasta/ pemerintah	Terbentuknya ekosistem organisasi kepemudaan yang mandiri dan profesional	Pemuda sebagai agen pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan olahraga
Peningkatan peran Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda	Perluasan program kepramukaan lintas sekolah dan komunitas	Penciptaan kader pemimpin muda melalui program kepemimpinan nasional	Pramuka dijadikan model pendidikan karakter nasional	
Peningkatan pemberdayaan pemuda dalam ekonomi mandiri	Pemetaan potensi ekonomi kreatif pemuda	Inkubasi bisnis rintisan (*start-up*) pemuda	Ekspansi produk wirausaha pemuda koperasi/kredit mikro	

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
Pembinaan Atlet Secara Terpadu dan Berjenjang	Pembinaan atlet mulai menggunakan pendekatan sport science	Pusat pelatihan olahraga regional	Peningkatan prestasi atlet di tingkat internasional	
Pengembangan olahraga masyarakat menuju gaya hidup sehat	Penguatan gaya hidup sehat melalui olahraga masyarakat	Pembentukan Program rutin olahraga masyarakat	Penguatan program olahraga masyarakat berbasis desa/kelurahan	
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal	Penguatan Monev kinerja internal instansi pemuda	Evaluasi sistem akuntabilitas berbasis teknologi	Transparansi penuh sistem akuntabilitas instansi pemuda	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemuda terintegrasi dengan pemerintah pusat
Penigkatan Kapasitas Kelembagaan	Penguatan tata kelola kelembagaan	Modernisasi kelembagaan dengan digitalisasi layanan	Peningkatan kapasitas kelembagaan berbasis SDM unggul	Kelembagaan kokoh, adaptif, dan berdaya saing

3.2.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rancangan Akhir Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	**Arah Kebijakan RPJMD**	**Arah Kebijakan Renstra**	**Ket.**
NSPK: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Partisipasi Olahraga **Sasaran RPJMD yang Relevan**: Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	Mendorong pengembangan pendidikan karakter dan penguatan nilai kebhinekaan dan toleransi.	Peningkatan Peran serta Pemuda	
		Peningkatan Sumber Daya Pemuda melalui Ilmu Pengetahuan Tekologi dan Iman Taqwa	
		Meningkatkaan pembinan dan pengembangan organisasi kepramukaan	
		Peningkatan Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda	

Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda	
		Peningkatan Kreativitas Pemuda	
		Peningkatan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	
		Meningkatnya event Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	
		Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan	
		Peningkatan mutu Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	
		Meningkatnya Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
		Meningkatnya Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus"	
		Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana olahraga	
		Penguatan Data perencanaan dan evaluasi	
		penguatan administrasi keuangan dan pelaporan	
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
NSPK: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Partisipasi Olahraga **Sasaran RPJMD yang Relevan**: Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	**Meningkatnya Kualitas Pemuda dalam Pembangunan**				**Nilai Kualitas Pemberdayaan Pemuda**		
		Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dan Pemuda dalam Masyarakat			**Persentase Organisasi Kepemudaan Aktif dan Pemuda Diberdayakan**		
			Pengembangan kualitas organisasi kepemudaan		**Persentase pemuda yang terlibat kegiatan kepemudaan**	**2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Kepala Bidang Pengembangan Pemuda**
				Meningkatnya Wawasan dan Kapasitas Pemuda	Jumlah anggota aktif OKP	**2.19.02.2.02 Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota**	Ketua Tim Kerja Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
				Meningkatnya Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Tekologi dan Iman Taqwa	Jumlah pemuda dalam kegiatan peningkatan SDM kepemudaan		Ketua Tim Kerja Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Tekologi dan Iman Taqwa
				Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian	Ketua Tim Kerja Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan organisasi kepemudaanTingkat Kabupaten/kota	Ketua Tim Kerja Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
			Meningkatnya peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda		**Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan**	**2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Kepala Bidang Pengembangan Pemuda**
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan kepramukaan	**2.19.04.2.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Ketua Tim Kerja Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
				Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2.19.04.2.01.005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
			Pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri		**Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda**	**2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda**
				Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula	Jumlah wirausaha muda yang berhasil	**2.19.02.2.01 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,**	Ketua Tim Kerja Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepeloporan	**Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader kabupaten/kota**	Ketua Tim Kerja Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
				Meningkatnya kreativitas pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan festival kepemudaan		Ketua Tim Kerja Peningkatan Kreativitas Pemuda
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
		Meningkatnya prestasi olahraga daerah			**Persentase prestasi olahraga daerah**		
			Meningkatnya Kejuaraan Olahraga		Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional	**2.19.03 PROGRAM PENGEMBAGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga
				Peningkatan ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah Penyelenggaraan single Event Kejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional	**2.19.03.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketua Tim Kerja Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
				Terselenggaranya Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	Jumlah penyelenggaraan multi event		Ketua Tim Kerja Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
				Meningkatnya Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan SDM keolahragaan		Ketua Tim Kerja Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan
				Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
				Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan	**2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Ketua Tim Kerja Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan
				Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
			Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan		**Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah**	**2.19.03 PROGRAM PENGEMBAGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga**
				Tercapainya Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	**Jumlah atlet yang menerima penghargaan**	**2.19.03.2.03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Penghargaan Olahraga**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Tercapainya Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	**Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terintegrasi**		**Ketua Tim Kerja Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga**
				Terselenggaranya Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus	**Jumlah Kejuaraan olahraga Rekreasi**	**2.19.03.2.05 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Ketua Tim Kerja Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus**
				Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
				Kepuasan masyarakat terhadap layanan sarana dan prasarana olahraga	**IKM pengguna sarana prasarana olahraga**	**2.19.03.2.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kepala UPTD Gelanggang Olahraga
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana dan prasarana yang di kelola**		Kasubag TU
				Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga			**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dispora**		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga		**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berkualitas**	**2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sekretaris**
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan**	**2.19.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan**	**2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.19.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terwujudnya tertib administrasi pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD yang sesuai peraturan perundangan**	**2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.19.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.19.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Bertambahnya sarana dan prasarana kantor**		**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selesai ditindaklanjuti**	**2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan**	**2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian OPD.**	**2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025-2029

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda	Meningkatnya kejuaraan olahraga		
		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
		Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
Beasiswa D3/D4/S1 bagi Masyarakat Miskin, Siswa Berprestasi dan Atlet	Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan		
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
		Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
Peningkatan peran organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan	Pengembangan kualitas organisasi kepemudaan		
		Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan organisasi kepemudaanTingkat Kabupaten/kota	
	Pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri		

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader kabupaten/kota	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdapat pada lampiran Tabel 4.2.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				58.883.300.190		65.222.393.341		67.981.461.745		67.829.257.616		69.006.042.458	
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA DAERAH KABUPATEN /KOTA				14.518.546.266		16.164.042.547		16.880.239.120		16.352.788.465		16.651.078.889	**Sekretaris**
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**14.518.546.266**	**100%**	**16.164.042.547**	**100%**	**16.880.239.120**	**100%**	**16.352.788.465**	**100%**	**16.651.078.889**	**Sekretaris**
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**151.564.800**		**191.069.720**		**191.069.720**		**166.569.720**		**171.069.720**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas	**Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**151.564.800**	**100%**	**191.069.720**	**100%**	**191.069.720**	**100%**	**166.569.720**	**100%**	**171.069.720**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Kepemudaan dan Olahraga beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**												
2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	49.998.000	3 dokumen	63.500.210	3 dokumen	63.500.210	3 dokumen	55.500.210	3 dokumen	63.500.210	
2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	49.998.000	1 dokumen	63.500.210	1 dokumen	63.500.210	1 dokumen	55.500.210	1 dokumen	63.500.210	
2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	5.000.000	
2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD													
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
	Dokumen DPA-SKPD												
2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	
2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3 dokumen	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.000.000	
2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	51.002.710	3 dokumen	51.002.710	3 dokumen	40.002.710	3 dokumen	41.002.710	
2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	40.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
	Statistik Sektoral Daerah												
2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**10.565.756.115**		**11.058.263.561**		**11.575.244.757**		**11.680.916.087**		**11.999.110.097**	**Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan**	**100%**	**100%**	**10.565.756.115**	**100%**	**11.058.263.561**	**100%**	**11.575.244.757**	**100%**	**11.680.916.087**	**100%**	**11.999.110.097**	**Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**
2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/ bulan	75 orang/ bulan	10.153.392.115	75 orang/ bulan	10.645.899.561	75 orang/ bulan	11.162.880.757	75 orang/ bulan	11.296.552.087	75 orang/ bulan	11.623.746.097	
2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.000.000	
2.19.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	
2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF								Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	3.400.000	1 dokumen	3.400.000	1 dokumen	3.400.000	1 dokumen	3.400.000	1 dokumen	3.400.000	
2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 dokumen	4	4.000.000	5	4.000.000	6	4.000.000	7	3.000.000	7	4.000.000	
2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	387.264.000	12 dokumen	387.264.000	12 dokumen	387.264.000	12 dokumen	360.264.000	12 dokumen	350.264.000	
2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 dokumen	1 dokumen	3.700.000	1 dokumen	3.700.000	1 dokumen	3.700.000	1 dokumen	3.700.000	1 dokumen	3.700.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**	**Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**
Terwujudnya tertib administrasi pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD yang sesuai peraturan perundangan**	**100%**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**
2.19.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah													
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	
2.19.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	9.000.000	
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				**957.531.061**		**1.351.014.976**		**1.124.931.159**		**1.004.938.348**		**1.004.931.159**	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum pelaksanaan kegiatan Dinas	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan**	**100%**	**100%**	**957.531.061**	**100%**	**1.351.014.976**	**100%**	**1.124.931.159**	**100%**	**1.004.938.348**	**100%**	**1.004.931.159**	**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF								Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Kepemudaan dan Olahraga	**sarpras kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga**												
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Bertambahnya sarana dan prasarana kantor**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**
2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	9.200.000	12 dokumen	9.200.000	12 dokumen	9.200.000	12 dokumen	9.200.000	12 dokumen	9.200.000	
2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	20 paket	25.000.000	20 paket	25.000.000	20 paket	25.000.000	20 paket	20.000.000	20 paket	25.000.000	
2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	45.000.000	10 paket	50.000.000	10 paket	50.000.000	10 paket	30.000.000	10 paket	30.000.000	
2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	350.000.000	50 laporan	520.065.806	50 laporan	520.981.989	50 laporan	438.989.178	50 laporan	430.981.989	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu													
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	45.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	53.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	53.000.000	
2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	10 paket	40.000.000	10 paket	47.000.000	10 paket	47.000.000	10 paket	37.000.000	10 paket	37.000.000	
2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 paket	5 paket	200.000.000	5 paket	250.000.000	5 paket	20.000.000	5 paket	20.000.000	5 paket	20.000.000	
2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	200.000.000	5 paket	355.749.170	5 paket	355.749.170	5 paket	355.749.170	5 paket	355.749.170	
2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	30.000.000	10 paket	35.000.000	10 paket	35.000.000	10 paket	35.000.000	10 paket	35.000.000	
2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**1.146.894.090**		**1.146.894.090**		**1.146.894.090**		**1.113.894.090**		**1.108.894.090**	**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selesai ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**1.146.894.090**	**100%**	**1.146.894.090**	**100%**	**1.146.894.090**	**100%**	**1.113.894.090**	**100%**	**1.108.894.090**	**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	728.894.090	12 laporan	728.894.090	12 laporan	728.894.090	12 laporan	708.894.090	12 laporan	708.894.090	
2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	358.000.000	12 laporan	358.000.000	12 laporan	358.000.000	12 bulan	345.000.000	12 bulan	340.000.000	
2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	60.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	60.000.000	
2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				**1.001.800.200**		**1.524.800.200**		**1.728.429.374**		**1.474.800.200**		**1.504.403.803**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Urusan Pemerintah Daerah													
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**	**1.001.800.200**	**100%**	**1.524.800.200**	**100%**	**1.728.429.374**	**100%**	**1.474.800.200**	**100%**	**1.504.403.803**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**
2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1	40.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	66.603.603	
2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	32	457.000.000	32	450.000.000	32	454.000.000	32	404.000.000	32	403.000.000	
2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel													
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 set	10	9.800.200	10	9.800.200	10	9.800.200	10	9.800.200	10	9.800.200	
2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas	Jumlah Gedung Kantor dan	10 tempat	11	475.000.000	12	1.000.000.000	13	1.200.000.000	12	1.000.000.000		1.000.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	5 set	5 set	15.000.000	5 set	15.000.000	5 set	14.500.000	5 set	13.000.000	5 set	12.000.000	
2.19.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	NA	2 unit	5.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	15.129.174	2 unit	13.000.000	2 unit	13.000.000	
2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**445.000.000**		**500.000.000**		**721.670.020**		**651.670.020**		**601.670.020**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi**
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**100%**	**100%**	**445.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**100%**	**721.670.020**	**100%**	**651.670.020**	**100%**	**601.670.020**	
2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel													
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 paket	7 paket	40.000.000	7 paket	150.000.000	7 paket	231.670.020	7 paket	201.670.020	7 paket	201.670.020	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 item	3 item	50.000.000	3 item	100.000.000	3 item	200.000.000	3 item	200.000.000	3 item	175.000.000	
2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**209.000.000**		**351.000.000**		**351.000.000**		**219.000.000**		**220.000.000**	**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian OPD.**	**100%**	**100%**	**209.000.000**	**100%**	**351.000.000**	**100%**	**351.000.000**	**100%**	**219.000.000**	**100%**	**220.000.000**	
2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	80.000.000	50 orang	80.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	
2.19.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 unit	3 unit	150.000.000	3 unit	250.000.000	3 unit	250.000.000	3 unit	150.000.000	3 unit	150.000.000	
2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	
2.19.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	0	50 orang	12.000.000	50 orang	12.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				**2.963.173.892**		**3.276.664.726**		**3.413.110.529**		**3.438.173.684**		**3.497.292.476**	**Kepala Bidang Pengembangan Pemuda**
Pengembangan kualitas organisasi kepemudaan	**Persentase pemuda yang terlibat kegiatan kepemudaan**	**0,76%**	**1,29%**	**2.963.173.892**	**1,29%**	**3.276.664.726**	**1,29%**	**3.413.110.529**	**1,29%**	**3.438.173.684**	**1,29%**	**3.497.292.476**	**Kepala Bidang Pengembangan Pemuda**
Pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri	**Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	**3.497.292.476**	**Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda**
2.19.02.2.02 Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota				**1.300.000.000**		**1.744.655.600**		**1.811.655.600**		**1.827.164.558**		**1.886.283.350**	
Meningkatnya Wawasan dan Kapasitas Pemuda	**Jumlah anggota aktif OKP**	**1500 orang**	**1500 orang**	**1.300.000.000**	**1500 orang**	**1.744.655.600**	**1500 orang**	**1.811.655.600**	**1500 orang**	**1.827.164.558**	**1500 orang**	**1.886.283.350**	**Ketua Tim Kerja Peningkatan**

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
													Wawasan dan Kapasitas Pemuda
Meningkatnya Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Tekologi dan Iman Taqwa	**Jumlah pemuda dalam kegiatan peningkatan SDM kepemudaan**	**NA**	**200 orang**		**200 orang**		**200 orang**		**200 orang**		**200 orang**		**Ketua Tim Kerja Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Tekologi dan Iman Taqwa**
2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian													
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	5 organisasi	5	600.000.000	5	932.800.000	5	960.800.000	5	960.800.000	5	999.427.750	
2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan organisasi kepemudaanTingkat Kabupaten/kota													
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi KepramukaanTingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	4 organisasi	4	700.000.000	4	811.855.600	4	850.855.600	4	866.364.558	4	886.855.600	
2.19.02.2.01 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda				**1.663.173.892**		**1.532.009.126**		**1.601.454.929**		**1.611.009.126**		**1.611.009.126**	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Pemula, dan Pemuda Kader kabupaten/kota													
Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula	**Jumlah wirausaha muda yang berhasil**	**NA**	**50 orang**	**1.663.173.892**	**50 orang**	**1.532.009.126**	**50 orang**	**1.601.454.929**	**50 orang**	**1.611.009.126**	**50 orang**	**1.611.009.126**	**Ketua Tim Kerja Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda**
Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	**Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepeloporan**	**NA**	**100 Orang**		**100 Orang**		**100 Orang**		**100 Orang**		**100 Orang**		**Ketua Tim Kerja Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda**
Meningkatnya kreativitas pemuda	**Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan festival kepemudaan**	**NA**	**500 Orang**		**500 Orang**		**500 Orang**		**500 Orang**		**500 Orang**		**Ketua Tim Kerja Peningkatan Kreativitas Pemuda**
2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota													
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	300 orang	300	746.962.000	300	746.962.000	300	760.962.000	300	760.962.000	300	760.962.000	
2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota													
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan,	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan	3 kegiatan	3 kegiatan	285.694.224	3 kegiatan	85.694.224	3 kegiatan	98.140.027	3 kegiatan	98.694.224	3 kegiatan	98.694.224	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda												
2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota													
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	1000 orang	1000	536.311.000	1000	536.311.000	1000	545.311.000	1000	545.311.000	1000	545.311.000	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				**2.510.749.638**		**2.776.375.965**		**2.891.988.907**		**2.913.225.361**		**2.963.317.760**	**Kepala Bidang Pengembangan Pemuda**
Meningkatnya peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan**	**7,10%**	**7,10%**	**2.510.749.638**	**7,10%**	**2.776.375.965**	**7,10%**	**2.891.988.907**	**7,10%**	**2.913.225.361**	**7,10%**	**2.963.317.760**	**Kepala Bidang Pengembangan Pemuda**
2.19.04.2.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				**2.510.749.638**		**2.776.375.965**		**2.891.988.907**		**2.913.225.361**		**2.963.317.760**	**Ketua Tim Kerja Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan**
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah kegiatan kepramukaan**	**75 kegiatan**	**76**	**2.510.749.638**	**77**	**2.776.375.965**	**78**	**2.891.988.907**	**79**	**2.913.225.361**	**79**	**2.963.317.760**	**Ketua Tim Kerja Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan**

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
2.19.04.2.01.005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah													
Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	75 kegiatan	76		77		78		79		79		
2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daeras													
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	4 organisasi	4	2.250.000.000	4	2.200.000.000	4	2.315.612.942	4	2.336.849.396	4	2.386.941.795	
2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah													
Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	16458 orang	16458 orang	260.749.638	16458 orang	576.375.965	16458 orang	576.375.965	16458 orang	576.375.965	16458 orang	576.375.965	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBAGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				**38.890.830.394**		**43.005.310.103**		**44.796.123.189**		**45.125.070.106**		**45.894.353.333**	**Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga**
Meningkatnya Kejuaraan Olahraga	**Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional**	**28,35%**	**94,70 %**	**38.890.830.394**	**29,59 %**	**43.005.310.103**	**37,48 %**	**44.796.123.189**	**29,59 %**	**45.125.070.106**	**94,67 %**	**45.894.353.333**	**Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga**
Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	**Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah**	**36,90%**	**36,90 %**		**36,90 %**	**43.005.310.103**	**36,90 %**	**44.796.123.189**	**36,90 %**		**36,90 %**	**45.900.987.759**	**Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga**
2.19.03.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan				**2.750.000.000**		**4.500.000.000**		**4.930.000.000**		**4.930.000.000**		**5.551.800.000**	**Ketua Tim Kerja Promosi**

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF								Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													**Olahraga dan Olahraga Prestasi**
Peningkatan ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	**Jumlah Penyelenggaraan single Event Kejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional**	**3 kegiatan**	**3 kegiatan**	**2.750.000.000**	**3 kegiatan**	**4.500.000.000**	**3 kegiatan**	**4.930.000.000**	**3 kegiatan**	**4.930.000.000**	**3 kegiatan**	**5.551.800.000**	**Ketua Tim Kerja Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi**
Terselenggaranya Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	**Jumlah penyelenggaraan multi event**	**NA**	**1 kegiatan**		**1 kegiatan**		**1 kegiatan**		**1 kegiatan**		**1 kegiatan**		**Ketua Tim Kerja Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga**
Meningkatnya Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan	**Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan SDM keolahragaan**	**NA**	**1 kegiatan**		**1 kegiatan**		**1 kegiatan**		**1 kegiatan**		**1 kegiatan**		**Ketua Tim Kerja Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan**
2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga	3 kegiatan	3	500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	2.301.800.000	
2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota													
Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	1 kegiatan	1	1.250.000.000	1	1.500.000.000	1	1.750.000.000	1	1.750.000.000	1	1.750.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Tingkat kabupaten/kota												
2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga													
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1000 orang	1000	1.000.000.000	1000	1.500.000.000	1000	1.680.000.000	1000	1.680.000.000	1000	1.500.000.000	
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				**27.222.868.130**		**27.592.120.288**		**28.823.243.526**		**28.864.566.260**		**28.864.566.260**	**Ketua Tim Kerja Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan**
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah Organisasi Keolahragaan**	**66**	**66**	**27.222.868.130**	**66**	**27.592.120.288**	**66**	**28.823.243.526**	**66**	**28.864.566.260**	**66**	**28.864.566.260**	**Ketua Tim Kerja Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan**
2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota													
Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	NA	97,06 %	22.000.000.000	97,06%	22.000.000.000	97,06%	22.000.000.000	97,06 %	22.000.000.000	97,06%	22.000.000.000	
2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait													

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	18.830.000	1 dokumen	18.830.000	1 dokumen	18.830.000	1 dokumen	18.830.000	
2.19.03.2.03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				**2.293.500.780**		**3.074.500.780**		**2.418.500.780**		**2.706.124.963**		**2.706.124.963**	
Tercapainya Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	**Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terintegrasi**	**8**	**8 tempat**	**2.293.500.780**	**8 tempat**	**3.074.500.780**	**8 tempat**	**2.418.500.780**	**8 tempat**	**2.706.124.963**	**8 tempat**	**2.706.124.963**	**Ketua Tim Kerja Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga**
Tercapainya Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	**Jumlah atlet yang menerima penghargaan**	**1014 orang**	**1034 orang**		**1054 orang**		**1074 orang**		**1074 orang**		**1074 orang**		**Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Penghargaan Olahraga**
2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)													
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (*Sport Science*)	1 kegiatan	2	2.000.000.000	3	2.280.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	
2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota													

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF								Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 orang	500 orang	200.000.000	500 orang	650.000.000	500 orang	300.000.000	500 orang	587.624.183	500 orang	587.624.183	
2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga													
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	200 orang	738 orang	50.000.000	210 orang	101.000.000	210 orang	75.000.000	215 orang	75.000.000	216 orang	75.000.000	
2.19.03.2.03.0010 Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota													
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	43.500.780	1 dokumen	43.500.780	1 dokumen	43.500.780	1 dokumen	43.500.780	1 dokumen	43.500.780	
2.19.03.2.05 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi													
Terselenggaranya Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus	Jumlah Kejuaraan olahraga Rekreasi	2 kegiatan	2 kegiatan	3.572.868.130	2 kegiatan	3.572.868.130	2 kegiatan	3.572.868.130	2 kegiatan	3.572.868.130	2 kegiatan	3.572.868.130	Ketua Tim Kerja Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi													
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 laporan	2 laporan	1.250.000.000	2 laporan	1.500.000.000	2 laporan	1.500.000.000	2 laporan	1.500.000.000	2 laporan	1.500.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan													
Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	NA	7 buah	400.000.000	7 buah	400.000.000	7 buah	1.631.123.238	7 buah	1.672.445.972	7 buah	1.672.445.972	
2.19.03.2.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**3.051.593.354**		**4.265.820.905**		**5.051.510.753**		**5.051.510.753**		**5.198.993.980**	
Kepuasan masyarakat terhadap layanan sarana dan prasarana olahraga	**IKM pengguna sarana prasarana olahraga**	**90**	**91**	**3.051.593.354**	**91**	**4.265.820.905**	**92**	**5.051.510.753**	**92**	**5.051.510.753**	**93**	**5.198.993.980**	**Kepala UPTD Gelanggang Olahraga**
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana dan prasarana yang di kelola**	**8 tempat**	**8 tempat**		**8 tempat**		**8 tempat**		**8 tempat**		**8 tempat**		**Kasubag TU**
2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota													
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	8	8	3.001.593.354	8	4.000.000.000	8	4.861.210.000	8	4.861.210.000	8	4.861.210.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	BASELINE (REALISASI TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Keterangan
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	
pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota													
2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota													
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	NA	0	50.000.000	0	225.520.152	0	150.000.000	1	150.000.000	1	297.483.227	
2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar													
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	40.300.753	1 dokumen	40.300.753	1 dokumen	40.300.753	1 dokumen	40.300.753	

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

No.	Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Baseline 2025 Rp.	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	01.00000.4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	806.400.000	862.848.000	923.247.360	987.874.675	1.057.025.902	1.131.017.715
2	01.00000.4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.145.688.525	6.575.886.722	7.036.198.792	7.528.732.707	8.055.743.996	8.619.646.076
3	01.00000.4.1.02.02.12.0001	Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan & Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	495.000.000	529.650.000	566.725.500	606.396.285	648.844.025	694.263.107
4	01.00000.4.1.2.02.09.0001	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.361.425.000	4.666.724.750	4.993.395.482	5.342.933.166	5.716.938.488	6.117.124.182
Jumlah Pendapatan			**11.808.513.525**	**12.635.109.472**	**13.519.567.134**	**14.465.936.833**	**15.478.552.411**	**16.562.051.080**

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	**Nilai Kualitas Pemberdayaan Pemuda**	**Angka**	**85**	**86**	**87**	**87**	**89**	**90**	
2.	Persentase Organisasi Kepemudaan Aktif dan Pemuda Diberdayakan	Persen	45,45%	50,51%	55,56%	60,61%	65,66%	70,71%	
3.	Persentase prestasi olahraga daerah	Persen	24,65%	72,78%	24,65%	27,12%	24,65%	24,65%	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali Emas	270	715	279	275	280	720	
2.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98	0.99	
3.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0.043	0.044	0.046	0.047	0.048	0.049	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Permasalahan belum optimalnya partisipasi pembangunan dan daya saing pemuda di Kota Semarang sangatlah komplek dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Rancangan Akhir Renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara optimal dan terpadu.

Diharapkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

22. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik sejarah, wisata dan budaya yang melimpah. Apabila dikelola dengan baik, daya tarik ini akan memberikan dampak positif bagi Kota Semarang. Kedatangan wisatawan ke Kota Semarang akan meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab membantu Wali Kota Semarang dalam urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata diwajibkan menyusun rencana strategis guna meningkatkan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang wajib menyusun dokumen Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, atas dasar tersebut maka Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mengintegrasikan antara

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat, sedangkan pemajuan kebudayaan yaitu upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Kota Semarang memiliki potensi seni dan budaya yang berlatar belakang dari 4 (empat) pilar seni budaya yang membentuk peradaban seni dan budaya Kota Semarang yaitu Jawa, Cina, Arab dan Belanda yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan terarah dapat menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisata baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara sekaligus mampu menjadikan Kota Semarang menjadi salah satu destinasi wisata nasional, regional asia bahkan internasional, salah satunya banyaknya kapal *cruise* yang bersandar di pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selain itu, Kota Semarang juga menjadi bagian penting dalam sejarah Jalur Sutra Maritim karena letaknya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa. Pada masa lalu, pelabuhan Kota Semarang menjadi salah satu titik persinggahan kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, Arab dan Eropa yang membawa komoditas seperti rempah-rempah, keramik dan kain sutra.

Budaya dan pariwisata memainkan peran strategis dalam mendorong kemajuan Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan identitas regional. Keberagaman warisan budaya seperti kawasan Kota Lama, tradisi dugderan, hingga pertunjukan Wayang Orang Ngesti Pandawa menjadi daya tarik khas yang membedakan Semarang dari kota-kota lain. Melalui pelestarian dan pemanfaatan kekayaan budaya tersebut, Kota Semarang tidak hanya memperkuat jati diri lokal, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui sektor pariwisata yang berbasis kearifan lokal.

Pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kreatif, desa wisata dan pelibatan masyarakat menjadi motor penggerak pertumbuhan inklusif di berbagai wilayah kota. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta promosi digital yang agresif telah memperluas pasar dan mendorong investasi di sektor perhotelan, kuliner dan jasa pendukung lainnya. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan partisipatif, budaya dan pariwisata di Kota Semarang berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing kota di tingkat nasional dan internasional.

Kebudayaan dan pariwisata memegang peran penting dalam penguatan citra dan daya saing daerah, sehingga pengambilan kebijakan perlu melihat tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan yang komprehensif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun."

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)", yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu "Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah."

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Periode Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Sehubungan hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga perlu memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

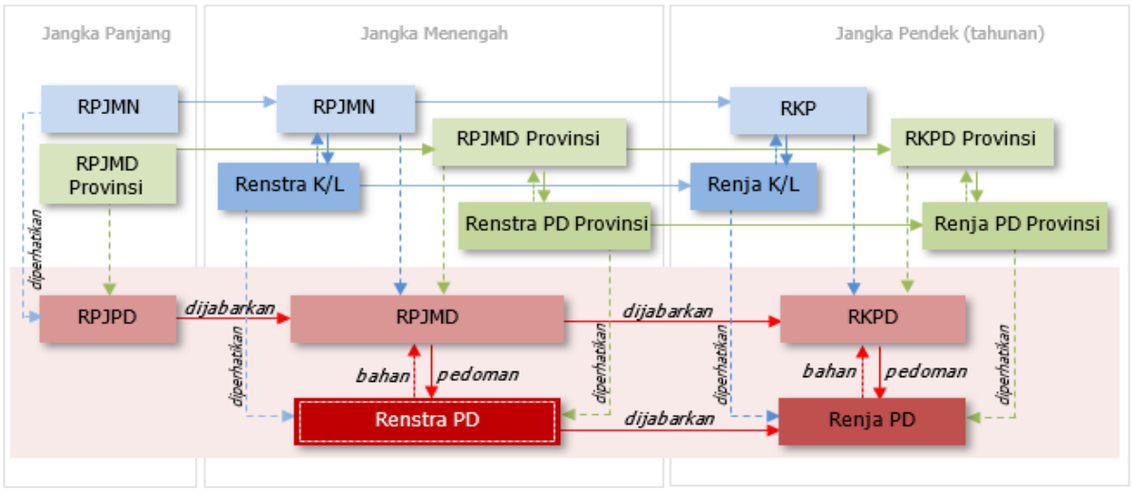

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Rencana Strategis
Perangkat Daerah (PD)

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagai Perubahan Pertama terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan ditetapkan pada 23 Juni 2023;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yang merupakan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan ditetapkan pada 27 Agustus 2024;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 40);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015–2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 111);
35. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan “Semarang Hebat” (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 126);
36. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 27);
37. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 39);
38. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.7/619 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum, Tim Pembina dan Tim Teknis Kota Sehat Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029 secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (PK); dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan
Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah membantu Wali Kota Semarang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang bertugas membantu Wali Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menjalankan tugas memiliki fungsi sebagai berikut :
    1) Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
    2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
    3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
    4) Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dinas;
    5) Penyelenggaraan kerja sama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
    6) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
    7) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
    8) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;

9) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
   - Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian
   - Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Kesenian, terdiri dari :
   - Subkoordinator Potensi Seni dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Pembinaan kesenian dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Pagelaran Kesenian dan Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
   - Subkoordinator Informasi Budaya dan Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Promosi Budaya dan Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Kerjasama Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Industri Pariwisata, terdiri dari :
   - Subkoordinator Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Destinasi Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional
f. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, terdiri dari :
   - Subkoordinator Kerjasama Organisasi Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Pengawasan Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional
g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
   - Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Museum dan Konservasi Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional
   - Subkoordinator Atraksi Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Unit pelaksana teknis Dinas di Kota Semarang antara lain : UPTD Kampoeng Wista Taman Lele, UPTD Taman Budaya Raden Saleh, UPTD Kreo dan Agro Wisata, dan UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo.
i. Kelompok Jabatan Terlampir Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat diihat pada Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

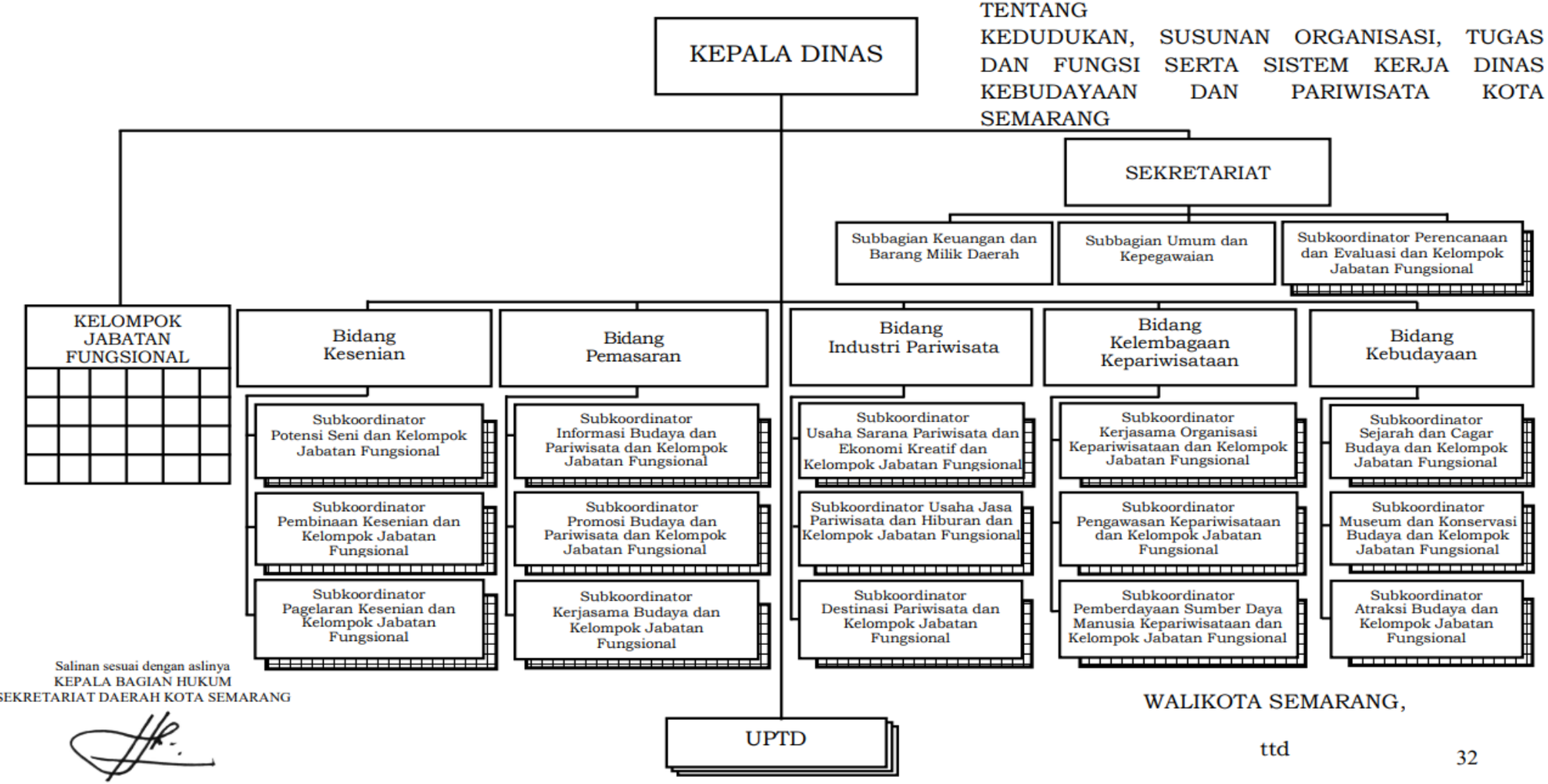

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki tugas merumuskan keijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

b) Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, Bidang Kebudayaan dan UPTD.

c) Bidang Kesenian
Bidang Kesenian yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas terkait Potensi Seni, Pembinaan Kesenian dan Pagelaran Kesenian.

d) Bidang Pemasaran
Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Informasi Budaya dan Pariwisata, Promosi Budaya dan Pariwisata, dan Kerjasama Budaya.

e) Bidang Industri Pariwisata
Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan, dan Destinasi Pariwisata.

f) Bidang Kelembagaan Kepariwisataan
Bidang Kelembagaan Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Kerjasama Organisasi Kepariwisataan, Pengawasan Kepariwisataan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan.

g) Bidang Kebudayaan
Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas terkait Sejarah dan Cagar Budaya, Museum dan Konservasi Budaya, dan Atraksi Budaya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana yang berupa asset dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga alih daya serta tenaga kontrak yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 sebanyak 70 orang, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 26 orang, tenaga kontrak 178 orang dengan jumlah total sebanyak 274 orang data ini per 31 Agustus 2025. Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025
(data per 31 Agustus 2025)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SD	2	0	2
2	SMP Sederajat	1	0	1
3	SMA Sederajat	8	3	11
4	D3	4	2	6
5	S1	14	23	37
6	S2	5	8	13
7	S3	0	0	0
	Total	34	36	70

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

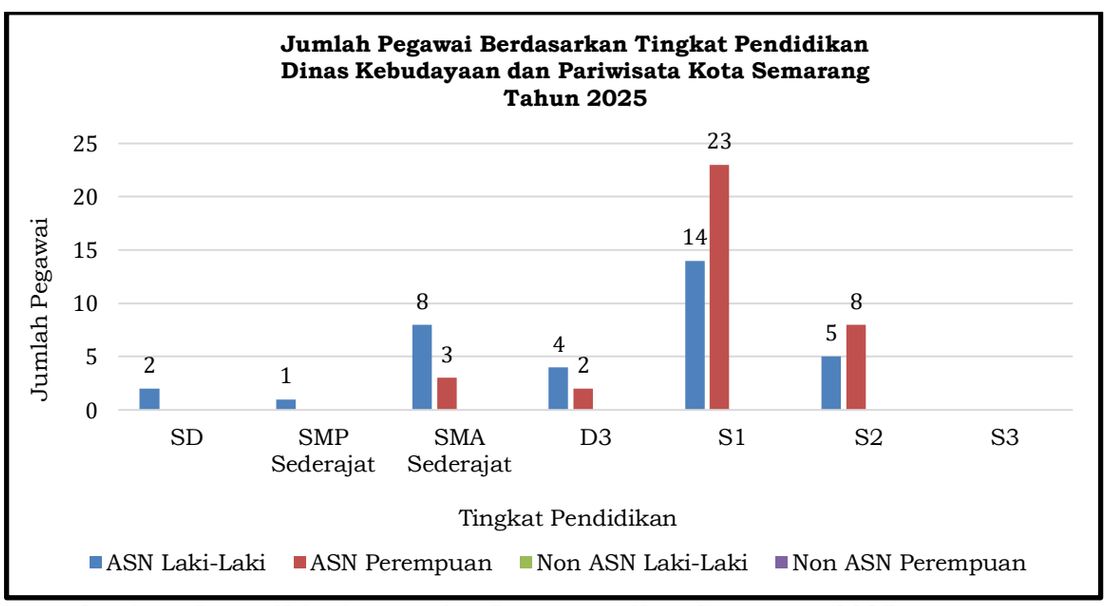

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Dari Tabel 2.1 dapat diperhatikan jumlah pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sebanyak 70 orang berstatus ASN dengan rincian 53 orang PNS, 7 orang CPNS dan 10 orang PPPK. Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berpendidikan S1, yaitu sebanyak 37 orang atau lebih dari separuh total pegawai. Selanjutnya, pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 13 orang, sedangkan lulusan SMA mencapai 11 orang. Adapun lulusan D3 sebanyak 6 orang, lulusan SD sebanyak 2 orang, dan lulusan SMP hanya 1 orang. Sementara belum terdapat pegawai dengan jenjang pendidikan S3. Jika digabungkan, jumlah pegawai dengan pendidikan S1 ke atas (S1, S2 dan S3) mencapai 50 orang, atau sekitar 71,4% dari total pegawai. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi. Dari sisi gender, komposisi pegawai relatif seimbang, yaitu 34 orang laki-laki dan 36 orang perempuan, dengan proporsi perempuan sedikit lebih banyak. Keseimbangan ini menjadi potensi yang positif dalam menciptakan dinamika kerja yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tergolong baik.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025
(data per 31 Agustus 2025)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	1	2
2	Golongan II	9	3	12
3	Golongan III	15	24	39
4	Golongan IV	4	3	7
5	Golongan VII (PPPK)	3	0	3
6	Golongan IX (PPPK)	2	5	7
	Total	34	36	70

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

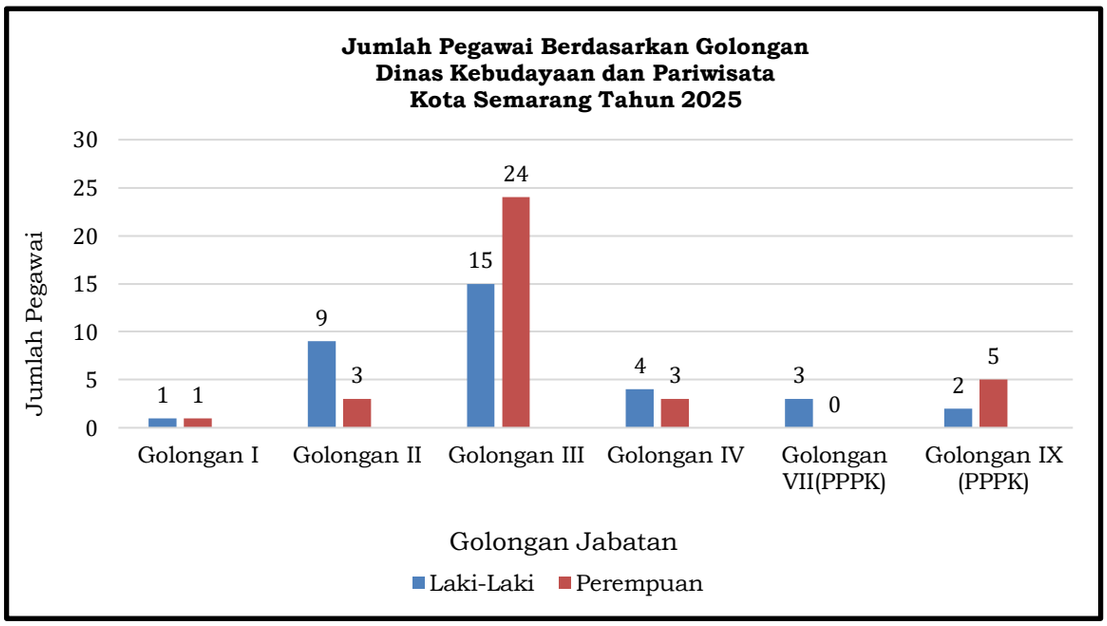

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Dari Tabel 2.2 dapat diperhatikan jumlah pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sebanyak 70 orang, berdasarkan golongan jumlah terbanyak berada pada Golongan III sebanyak 39 orang, Golongan II sebanyak 12 orang, Golongan IV dan Golongan IX (PPPK) masing-masing sebanyak 7 orang, serta Golongan VII (PPPK) sebanyak 3 orang. Adapun pegawai di Golongan I hanya berjumlah 2 orang. Jika dilihat dari sisi gender, proporsi pegawai relatif seimbang dengan 34 orang laki-laki dan 36 orang perempuan. Pada golongan III terlihat pegawai perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki. Struktur golongan ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai sudah berada pada Golongan III.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Aset Tanah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	89983	2010	Jl. Sriwijaya No. 29. Kelurahan Tegalsari. Kecamatan Candisari	Hak Pakai			UPTD TBRS	Pembelian	96.440.384.437	
2	Tanah Lapangan Taman lainnya	29911	2009	Jl. Sriwijaya No 29 Candisari, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari	Hak Pakai			UPTD TBRS ex. Wonderia	Pembelian	48.019.515.563	
3	Tanah Lapangan Taman lainnya	26059	2011	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW : 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati	Hak Pakai			UPTD Goa Kreo	Pembelian	2.129.000.000	
4	Tanah Lapangan Taman lainnya	4586	2010	Jl.Purwosari Raya Agro Tuk Dandang Sodong. Kelurahan Purwosari. Kecamatan Mijen	Hak Pakai			Agro Wisata Sodong	Pembelian	399.000.000	
5	Tanah Lapangan Taman lainnya	22173	2010	Jl.Walisongo KM.9. Kelurahan Tambakaji.	Hak Pakai			UPTD Taman Lele	Pembelian	12.204.100.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Kecamatan Ngaliyan							
6	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat	1196	2015	Jalan Taman Sri gunting No.3, Kelurahan Tanjungmas. Kecamatan Semarang Utara	Hak Pakai			Gedung Oudetrap	Pembelian	7.237.190.542	
7	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1600	2010	JL.Alternatif Cibubur Kav.27 RT 05 RW 09 Harjamukti Cimanggis Depok	Hak Pakai			Bangunan Wisma Semarang	Pembelian	1.504.000.000	
8	Tanah Bangunan Kandang Hewan	575000	2010	Jl. Tinjomoyo Barat. Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati	Hak Pakai			UPTD Tinjomoyo	Pembelian	29.188.200.000	
9	Tanah Persil Lainnya	526	2021	Jl. Depok No. 37 RT. 006 / RW 002 Kembangsari , Semarang Tengah	Hak Pakai			Tanah Wisata Religi	Pembelian	19.990.000.000	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Tabel 2.4
Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	B	767	Wisma Semarang, Jl. Alternatif Cibubur Kav.27 RT 05 RW 09 Harjamukti Cimanggis Depok		Milik Pemda	Pembelian	2.042.092.000	
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	15000	Jalan Margasatwa Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	2.404.756.123	
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1500	Jl. Raya Mangkang Kel Wonosari Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	363.532.173	
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	12	Obyek Wisata Taman Lele revisi Jl. Walisongo KM 10 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang		Milik Pemda	Pembelian	63.558.079	
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	6.25	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	19.109.680	
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	17.64	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	104.024.887	
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	21	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	215.994.100	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	15.5	Jl. Sriwijaya No 29		Milik Pemda	Hibah	18.570.000	
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	30	Jl. Sriwijaya No 29		Milik Pemda	Hibah	39.730.000	
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	15.5	Jl. Sriwijaya No 9		Milik Pemda	Hibah	18.670.000	
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	31	Jl. Sriwijaya No 9		Milik Pemda	Hibah	39.760.000	
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	206	Jl. Sriwijaya No 29		Milik Pemda	Hibah	21.300.000	
13	Tugu/Tanda Batas	B	18	Jl. Sriwijaya No 9		Milik Pemda	Hibah	6.210.000	
14	Tugu/Tanda Batas	B	80	Jl. Sriwijaya No 9		Milik Pemda	Hibah	27.840.000	
15	Tugu/Tanda Batas	B	24.07	Jl. Sriwijaya No 29		Milik Pemda	Hibah	2.020.000	
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	7826	Jl. Sriwijaya No 29		Milik Pemda	Hibah	176.090.000	
17	Tugu/Tanda Batas	B	208	Jl. Sriwijaya No 29		Milik Pemda	Hibah	5.210.000	
18	Tugu/Tanda Batas	B	2056	Jl. Sriwijaya No 29		Milik Pemda	Hibah	213.820.000	
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	9	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	113.140.966	
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	125	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	52.863.027	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	10	Jl Sriwijaya KM 29		Milik Pemda	Pembelian	33.365.491	
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	6.75	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	30.296.022	
23	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	32	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	19.000.000	
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	12.2	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	6.500.000	
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	16	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	13.000.000	
26	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	9	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	60.090.710	
27	Tugu/Tanda Batas	B	441	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	1.013.091.222	
28	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	3	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	20.281.160	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
29	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	3	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	20.907.510	
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	24	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	22.568.818	
31	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	416.37	UPTD Taman Lele, Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	407.382.403	
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	112.02	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	191.112.962	
33	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	2	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	14.338.038	
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	16	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	53.597.070	
35	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	4.46	UPTD Goa Kreo		Milik Pemda	Pembelian	17.699.279	
36	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	19.5	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	157.250.000	
37	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	6	UPTD TBRS		Milik Pemda	Pembelian	51.510.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	86	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	348.545.000	
39	Tugu/Tanda Batas	B	175	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	270.117.000	
40	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	858	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	1.249.446.100	
41	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	90	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	765.106.055	
42	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	120	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	287.039.395	
43	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	80	Makam Syafii Mangkang Kel Wonosari Kec Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	195.933.000	
44	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	258	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	235.194.000	
45	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	125	Soen An Ing Jl. Lebdosari Raya Kel Kalibanteng Kulon Kec Semarang Barat		Milik Pemda	Pembelian	195.941.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
46	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	138	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	195.978.000	
47	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	27	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	97.488.000	
48	Tugu/Tanda Batas	B	152	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	197.585.000	
49	Tugu/Tanda Batas	B	97.65	UPTD TBRS		Milik Pemda	Pembelian	186.930.000	
50	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	73.15	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	187.017.512	
51	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Tinjomoyo		Milik Pemda	Pembelian	7.350.000	
52	Bangunan Menara Perambuan	B	30	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	196.584.000	
53	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	108.655.000	
54	Tugu/Tanda Batas	B	20.8	Jl. Sriwijaya 29 (Ex Wonderia)		Milik Pemda	Pembelian	66.136.000	
55	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	51	UPTD Tinjomoyo revisi Jl. Tinjomoyo Barat, Kel. Sukorejo		Milik Pemda	Pembelian	187.098.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
				Kec. GunungPati Kota Semarang					
56	Tugu/Tanda Batas	B	12	Wisma Semarang Jl. Alternatif Cibubur Kav 27 RT 05 RW 09 Harjamukti Cimanggis Depok		Milik Pemda	Pembelian	199.320.000	
57	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	100	Museum Kota Lama Kel Purwodinatan Kec Semarang Tengah		Milik Pemda	Pembelian	303.892.819	
58	Tugu/Tanda Batas	B	146.7	Jl. Genuk Krajan		Milik Pemda	Pembelian	253.863.800	
59	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	400	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	243.064.300	
60	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	145	Agro Wisata Sodong, Kel Purwosari Kec Mijen		Milik Pemda	Pembelian	1.879.400.562	
61	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1394	Agro Wisata Sodong, Kel Purwosari Kec Mijen		Milik Pemda	Pembelian	809.174.706	
62	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	72.6	Agro Wisata Sodong, Kel Purwosari Kec Mijen		Milik Pemda	Pembelian	507.883.693	
63	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	70	Agro Wisata Sodong, Kel Purwosari Kec Mijen		Milik Pemda	Pembelian	171.646.363	
64	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1054.8	Agro Wisata Sodong, Kel Purwosari Kec Mijen		Milik Pemda	Pembelian	397.679.504	
65	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	59.85	Agro Wisata Sodong, Kel Purwosari		Milik Pemda	Pembelian	554.803.642	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
				Kec Mijen					
66	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	18.6	Agro Wisata Sodong, Kel Purwosari Kec Mijen		Milik Pemda	Pembelian	333.676.023	
67	Tugu/Tanda Batas	B	42	Wisma Semarang Jl. Alternatif Cibubur Kav.27 RT 05 RW 09 Harjamukti Cimanggis Depok		Milik Pemda	Pembelian	242.482.000	
68	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	6	Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	20.868.000	
69	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	0	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	79.084.900	
70	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Depan Semarang Zoo (Batas Kota) Jl. Pantura Semarang-Kendal		Milik Pemda	Pembelian	254.506.000	
71	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Sendang Kali Pancur Revisi Jl. Candi Penataran 8, Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang		Milik Pemda	Pembelian	242.960.000	
72	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	1.180.177.808	
73	Tugu/Tanda Batas	B		UPTD TBRS		Milik Pemda	Pembelian	142.450.000	
74	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Jl. Suari, Kota Lama		Milik Pemda	Pembelian	47.238.500	
75	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Jl. Sendowo Kota Lama		Milik Pemda	Pembelian	27.032.500	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
76	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Jl. Suari II Kota Lama		Milik Pemda	Pembelian	28.897.300	
77	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	1.168.716.001	
78	Tugu/Tanda Batas	B	19.93	Wisata Religi Depok Jl. Depok Semarang		Milik Pemda	Hibah	79.775.996	
79	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	124.49	Wisata Religi Depok Jl. Depok Semarang		Milik Pemda	Hibah	1.776.596.454	
80	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	103.61	Wisata Religi Depok Jl. Depok Semarang		Milik Pemda	Hibah	1.726.253.281	
81	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	282.42	Wisata Religi Depok Jl. Depok Semarang		Milik Pemda	Hibah	563.111.836	
82	Tugu/Tanda Batas	B	20	Kampung Melayu		Milik Pemda	Hibah	546.105.747	
83	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	354.049.029	
84	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	354.935.052	
85	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	287.453.009	
86	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	1.665.000	
87	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	1.665.000	
88	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	1.665.000	
89	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	1.665.000	
90	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	1.665.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
91	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	1.665.000	
92	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	1.665.000	
93	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	1.665.000	
94	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
95	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
96	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
97	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
98	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
99	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
100	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
102	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
103	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	40.024.503	
104	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	919.42	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	108.653.552	
105	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	2	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	49.345.360	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
106	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	406.96	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	107.617.713	
107	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	12.32	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	34.180.522	
108	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	16.8	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	60.381.319	
109	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	86.11	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	75.234.998	
110	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	12.32	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	33.957.100	
111	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	57.28	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	31.828.959	
112	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	16.7	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	54.126.265	
113	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	43.08	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	119.054.727	
114	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	131	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	546.269.079	
115	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	113.73	Kampug Jawi		Milik Pemda	Hibah	81.428.071	
116	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	197.34	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	115.038.922	
117	Bangunan Menara Perambuan	B	20.25	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	210.936.289	
118	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	39.24	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	192.655.886	
119	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	47.8	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	130.259.859	
120	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	4	Kampung Jawi		Milik Pemda	Hibah	25.640.589	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
121	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	364.38	UPTD Goa Kreo		Milik Pemda	Hibah	189.522.024	
122	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	89.910.000	
123	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	14.670.067	
124	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	184.897.302	
125	Tugu/Tanda Batas	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	48.939.281	
126	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Museum Kota Lama		Milik Pemda	Pembelian	23.273.887.757	
127	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Jl. Letjend Soeprapto Kawasan Kota Lama		Milik Pemda	Pembelian	35.419.411	
128	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Jl. Letjend Soeprapto Kawasan Kota Lama		Milik Pemda	Pembelian	16.758.926	
129	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	197.358.000	
130	Tugu/Tanda Batas	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	86.537.860	
131	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	3820	UPTD TBRS Jl. Sriwijaya No.29		Milik Pemda	Pembelian	23.016.973.123	
132	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Tinjomoyo		Milik Pemda	Pembelian	48.190.436	
133	Tugu/Tanda Batas	B		Pantai Tirang		Milik Pemda	Pembelian	10.730.493	
134	Tugu/Tanda Batas	B		Pantai Tirang		Milik Pemda	Pembelian	10.730.493	
135	Tugu/Tanda Batas	B		Tugu		Milik Pemda	Pembelian	10.730.493	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
136	Tugu/Tanda Batas	B		Pantai Tirang		Milik Pemda	Pembelian	155.080.030	
137	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	21.746.914	
138	Tugu/Tanda Batas	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	31.500.701	
139	Tugu/Tanda Batas	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	73.677.842	
140	Tugu/Tanda Batas	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	12.987.023	
141	Tugu/Tanda Batas	B		UPTD TBRS		Milik Pemda	Pembelian	196.275.000	
142	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	130.141.918	
143	Tugu/Tanda Batas	B		Agro Wisata Sodong		Milik Pemda	Pembelian	67.737.082	
144	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Goa Kreo		Milik Pemda	Pembelian	35.500.000	
145	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD Taman Lele		Milik Pemda	Pembelian	119.626.816	
146	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD TBRS		Milik Pemda	Pembelian	385.412.030	
147	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD TBRS		Milik Pemda	Pembelian	196.649.234	
148	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD TBRS		Milik Pemda	Pembelian	147.519.737	
149	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		UPTD TBRS		Milik Pemda	Pembelian	1.483.455.176	
150	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Kampung Melayu		Milik Pemda	Pembelian	10.074.212	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
151	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B		Kampung Melayu		Milik Pemda	Pembelian	10.074.212	
152	Tugu/Tanda Batas	B		Jalan Tugurejo		Milik Pemda	Pembelian	10.730.493	
153	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	456	Tinjomoyo		Milik Pemda	Pembelian	52.045.000	
154	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	50	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	146.067.956	
155	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	400	Jl. Wilis 2 (daerah taman wilis) Kel Tegalsari Kec Candisari		Milik Pemda	Pembelian	96.310.000	
156	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	22.5	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	63.272.168	
157	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW : 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	95.019.120	
158	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW : 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	43.824.076	
159	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW : 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	22.204.449	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
160	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	79.558.645	
161	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	22.5	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	103.149.862	
162	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	528	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	299.871.000	
163	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	280	Jl. Sriwijaya No. 29 Kel. Tegalsari Kec. Candisari		Milik Pemda	Pembelian	244.266.772	
164	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	20	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	52.997.595	
165	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	7.84	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	15.238.181	
166	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	117	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	25.665.797	
167	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	48	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	98.959.000	
168	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	20	Jl. Sriwijaya No. 29 Kel. Tegalsari Kec. Candisari		Milik Pemda	Pembelian	30.125.000	
169	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	225	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	114.649.937	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
170	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	20	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	15.000.000	
171	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	68	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	6.814.000	
172	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	2180	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	1.176.851.046	
173	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1225	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	149.906.000	
174	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	216	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	89.000.000	
175	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	300	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	78.066.789	
176	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	11.6	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	10.000.000	
177	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	22.5	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	6.000.000	
178	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	600	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	18.500.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
179	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	225	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	7.000.000	
180	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	943.2	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	24.000.000	
181	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1369	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	68.177.898	
182	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	45	UPTD Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang		Milik Pemda	Pembelian	296.148.897	
183	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	18	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	15.000.000	
184	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	10	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	2.000.000	
185	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	100	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	1.000.000	
186	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1224	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	48.960.000	
187	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	127.69	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo		Milik Pemda	Pembelian	149.216.109	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
				Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati					
188	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	6	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	12.157.053	
189	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	45	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	205.144.000	
190	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	25	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	5.000.000	
191	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	21	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	6.000.000	
192	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	21	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	7.500.000	
193	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	21	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	5.000.000	
194	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	32	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	6.000.000	
195	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	59	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	15.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
196	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	16	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	5.000.000	
197	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	16	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	5.000.000	
198	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	20	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	25.000.000	
199	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	50	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	5.000.000	
200	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	75	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	8.691.000	
201	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	32	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	61.724.000	
202	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	90	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	23.133.000	
203	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	40	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	13.500.000	
204	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	276	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	524.208.243	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
205	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	100	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	20.770.000	
206	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	50	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	16.736.000	
207	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	4	Jl. Sriwijaya No. 29 Kel. Tegalsari Kec. Candisari		Milik Pemda	Pembelian	49.489.000	
208	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1650	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	350.000.000	
209	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	20	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	50.000.000	
210	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	115	Agro Wisata Sodong, Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen		Milik Pemda	Pembelian	101.398.389	
211	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	260	Agro Wisata Sodong, Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen		Milik Pemda	Pembelian	477.512.984	
212	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	125	Jl. Sriwijaya No. 29		Milik Pemda	Pembelian	164.148.000	
213	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	32	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW : 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	34.300.000	
214	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1	TBRS		Milik Pemda	Pembelian	201.395.309	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
215	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	73.63	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Jl. Tinjomoyo Barat Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	165.935.113	
216	Bangunan Gedung Tempat Kerja	B	1	UPTD Taman Lele Jl. Walisongo KM 9 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan		Milik Pemda	Pembelian	173.311.112	
217	Bangunan Menara Perambuan	B	9.4	Agro Wisata Sodong, Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen		Milik Pemda	Pembelian	256.186.241	
218	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	B	1	UPTD Goa Kreo Jl. Raya Goa Kreo Kel Kandri Kec Gunung Pati		Milik Pemda	Pembelian	122.035.859	
219	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	B	1420	Jl. Taman Srigunting		Milik Pemda	Pembelian	11.988.762.156	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi 2 (dua) capaian kinerja yakni urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang disajikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SDG's)	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/SASARAN																			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Pelestarian budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal																		
	Indikator Tujuan 1 : Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal	%			59,90	41,44	49,95	55,17	61,05	90,58	50,57	62,41	71,94	86,10	151,22	122,03	124,94	130,40	141,03
	Indikator Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	nilai			84,53	84,53	84,55	84,60	84,65	84,61	84,61	76,20	76,95	80,10	100,09	100,09	90,12	90,96	94,62
2	Tujuan 2 : Meningkatnya Kunjungan Wisata Kota Semarang																		
	Indikator Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata	%			4,9	5	19	19	19	10,17	7,96	14,13	15,50	16,55	207,55	159,20	74,37	81,58	87,11
3	Sasaran 1 : Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal																		
	Indikator Sasaran 1 : Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%			60,17	65,30	71,57	77,85	85,45	70,96	71,30	77,78	78,93	129,22	117,93	109,19	108,68	108,77	151,22
	Indikator Sasaran 2 : Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%			34,24	20,45	28,33	32,50	36,66	23,92	25,66	45,27	64,96	42,99	69,86	125,48	159,80	199,88	117,27
4	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang																		
	Indikator Sasaran : Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Angka			84,53	84,53	84,55	84,60	84,65	84,61	84,61	76,20	76,95	80,10	100,09	100,09	90,12	90,96	94,62
5	Sasaran 3 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara																		
	Indikator Sasaran : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	orang		√	6.207.678	3.455.921	3.663.276	3.883.073	4.116.057	3.260.303	2.663.684	5.338.233	6.478.883	7.321.077	52,52	77,08	145,72	166,85	177,87
6	Sasaran 4 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara																		
	Indikator Sasaran : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	orang		√	74.472	7.025	7.447	7.894	8.367	6.628	77	4.918	13.992	24.296	8,90	1,10	66,04	177,25	290,38
7	Sasaran 5 : Meningkatnya Tingkat Hunian Akomodasi																		
	Indikator Sasaran : Tingkat Hunian Akomodasi	%			33,96	33,96	37,60	41,24	44,88	30,32	31,74	54,01	57,11	57,48	89,28	93,46	143,64	138,48	128,07

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SDG's)	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
8	Sasaran 6 : Lama Menginap Wisatawan																		
	Indikator Sasaran : Lama Tinggal Wisatawan	hari			1,55	1,25	1,30	1,35	1,40	1,40	1,32	1,43	1,38	1,38	90,32	105,60	110,00	102,22	98,57
INDIKATOR KINERJA KUNCI																			
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
1	Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang	Kelompok			773	819	889	991	1.041	813	859	929	1.031	1.081	105,17	104,88	104,50	104,04	103,84
2	Jumlah grup kesenian	Kelompok			773	819	889	991	1.041	813	859	929	1.031	1.081	105,17	104,88	104,50	104,04	103,84
3	Jumlah gedung kesenian	Gedung			14	14	14	14	14	14	14	15	15	18	100,00	100,00	107,14	107,14	128,57
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Gedung			181	183	185	187	189	199	199	200	202	208	109,94	108,74	108,11	108,02	110,05
5	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata	Buah			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6	Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	√		298	333	411	435	460	336	351	400	401	524	112,75	105,41	97,32	92,18	113,91
7	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	√		461	461	461	461	461	461	461	534	578	698	100,00	100,00	115,84	125,38	151,41
8	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	√		4	8	10	12	14	4	4	8	10	11	100,00	50,00	80,00	83,33	78,57
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																			
1	Persentase Kenaikan Kunjungan wisata	%			8,5	9	6	6	6	-59,77	-18,46	100,58	21,52	13,13	-703,18	-205,11	1676,33	358,67	218,83
2	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang	Orang			6.282.150	3.462.946	3.670.723	3.890.967	4.124.424	3.266.931	2.663.761	5.343.151	6.492.875	7.345.373	52,00	76,92	145,56	166,87	178,09
3	Pendapatan sektor pariwisata	Juta Rupiah			351.500.000.000	489.869.751.460	646.011.44.300	493.000.000.000	626.264.741.283	190.758.295.291	207.712.087.923	357.978.839.578	447.122.505.670	468.977.857.125	54,27	42,40	65,56	90,69	74,88
4	Jumlah Destinasi Wisata	Obyek			67	190	354	361	386	71	200	373	381	407	105,97	105,26	105,37	105,54	105,44
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	Orang			8.594	8.633	9.150	9.607	10.087	5.109	427.305	770.439	799.896	1.251.084	59,45	4949,67	8420,10	8326,18	12402,93
6	Lama menginap MICE	hari			1,55	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40	1,32	1,43	1,74	1,33	90,32	82,50	92,26	116,00	91,72
7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	√		8,5	9	6	6	6	-59,77 (3.266.931)	-18,46 (2.663.761)	100,59 (5.343.151)	21,52 (6.492.875)	13,13 (7.345.373)	-703,18	-205,11	1676,50	358,67	218,83

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SDG's)	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
INDIKATOR TPB																			
1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%			2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah wisatawan mancanegara	orang		√	74.472	7.025	7.447	7.894	8.367	6.628	77	4.918	13.992	24.296	8,90	1,10	66,04	177,25	290,38
3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang		√	6.207.678	3.455.921	3.663.276	3.883.073	4.116.057	3.260.303	2.663.684	5.338.233	6.478.883	7.321.077	52,52	77,08	145,72	166,85	177,87
4	Jumlah devisa sektor pariwisata	%			US$ 3,38 miliar	US$360 juta – US$410 juta	US$ 0,47-1,7 miliar	US$ 7,08–9,99 miliar	US$ 7,38–13,08 miliar	US$ 3,31 miliar	US$1,56 miliar	US$ 7,03 miliar	US$ 14 miliar	US$ 155,7 miliar	97,93	0,38	413,53	140,14	1185,02

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama Rencana Strategis disusun
2	Indikator kinerja yang ada di Rencana Strategis sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua Rencana Strategis disusun
		13	Realisasi tahun ketiga Rencana Strategis disusun
3	Satuan kinerja	14	Realisasi tahun keempat Rencana Strategis disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	15	Realisasi tahun kelima Rencana Strategis disusun
5	Target dari Kementerian terkait misalnya	16	Rasio tahun pertama Rencana Strategis disusun
6	Target awal atau tahun pertama Rencana Strategis disusun	17	Rasio tahun kedua Rencana Strategis disusun
7	Target tahun kedua Rencana Strategis disusun	18	Rasio tahun ketiga Rencana Strategis disusun
8	Target tahun ketiga Rencana Strategis disusun	19	Rasio tahun keempat Rencana Strategis disusun
9	Target tahun keempat Rencana Strategis disusun	20	Rasio tahun kelima Rencana Strategis disusun
10	Target tahun elima Rencana Strategis disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang dapat diperhatikan pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40.384.301.440	65.512.632.974	51.036.109.999	62.040.967.222	49.095.886.687	36.277.788.248	59.826.237.622	46.684.619.391	58.026.705.904	46.628.626.040	89,83	91,32	91,47	93,53	94,97	10,21	11,90
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																	
Program Pengembangan Kebudayaan	63.940.000	4.939.331.427	6.483.400.599	12.493.445.020	8.943.204.869	63.940.000	4.698.996.879	6.118.069.316	12.103.901.418	8.653.467.296	100,00	95,13	94,37	96,88	96,76	1930,12	-591,83
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	4.288.075.000	2.899.401.828	3.092.102.780	4.670.839.520	1.141.793.464	4.070.755.000	2.555.300.500	2.796.065.813	4.225.339.412	1.116.438.612	94,93	88,13	90,43	90,46	97,78	-12,56	-0,13
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	124.675.000	251.251.038	624.570.811	3.249.308.750	1.308.620.960	124.675.000	239.121.000	606.877.183	3.151.972.492	1.107.718.272	100,00	95,17	97,17	96,88	84,65	1,53	150,03
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.720.3755.740	19.351.359.229	17.910.467.456	18.712.587.778	17.969.925.840	14.864.389.761	16.257.198.369	16.739.978.442	17.967.651.721	16.882.232.522	94,55	84,01	93,46	96,02	93,95	4,04	3,41
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	19.805.849.700	35.565.378.909	20.248.149.447	17.557.409.883	14.280.259.400	16.836.942.987	33.876.101.830	17.890.274.483	15.723.507.208	13.912.414.499	84,69	95,25	88,36	89,55	97,42	1,14	7,79
Program Pemasaran Pariwisata	381.386.000	1.492.523.730	1.682.210.260	3.591.914.696	4.164.769.930	381.025.500	1.339.184.890	1.624.010.282	3.410.096.422	3.990.973.992	99,91	89,73	96,54	94,94	95,83	108,38	1,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	1.013.386.813	995.208.646	1.765.461.575	1.287.312.224	-	860.334.154	909.343.872	1.444.237.231	965.380.847	-	84,90	91,37	81,81	74,99	0,12	7,84

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Keterangan:

1	Nama program/ kegiatan periode Rencana Strategis sebelumnya	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama Rencana Strategis disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama Rencana Strategis disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua Rencana Strategis disusun
3	Anggaran tahun kedua Rencana Strategis disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga Rencana Strategis disusun
4	Anggaran tahun ketiga Rencana Strategis disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat Rencana Strategis disusun
5	Anggaran tahun keempat Rencana Strategis disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima Rencana Strategis disusun
6	Anggaran tahun elima Rencana Strategis disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keternagan 2-6
7	Realisasi anggaran tahun pertama Rencana Strategis disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keternagan 7 -11
8	Realisasi anggaran tahun kedua Rencana Strategis disusun		
9	Realisasi anggaran tahun ketiga Rencana Strategis disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat Rencana Strategis disusun		
11	Realisasi anggaran tahun kelima Rencana Strategis disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

Dari Tabel 2.6 dapat diperhatikan bahwa anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Tahun 2020

Pada tahun 2020 ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian disesuaikan secara nasional pada tahun 2021 dengan menggunakan nomenklatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penyesuaian ini mengakibatkan adanya perbedaan struktur program, kegiatan dan sub kegiatan di mana beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang sebelumnya tercantum tidak lagi muncul karena telah digabung atau dipisahkan sesuai dengan kodefikasi dan klasifikasi nomenklatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun Pemerintah Kota Semarang menggunakan Sim Anggaran yang leading sektornya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Anggaran sebesar Rp 40.384.301.440,- realisasi sebesar Rp 36.277.788.248,-. dengan realisasi angaran sebesar 89,83% maka dapat disimpulkan anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2020 sudah optimal dengan tingkat serapan anggaran berada pada kategori tinggi atau baik. Tahun 2020 anggaran diefesiensikan karena adanya pandemi covid-19.

Pada tahun 2020 ada permasalahan atau kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Masa pandemi pelaku seni budaya khususnya para musisi dan penari merasakan dampak ekonomi yang sangat besar karena tidak dapat tampil di tempat pertunjukkan dan tidak bisa mengadakan pagelaran seni budaya.
2. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya masih rendah dengan dijumpai beberapa kasus pengrusakan, pencurian maupun perilaku

terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang menimbulkan hilangnya outentisitas nilai.
3. Pelaku seni budaya khususnya seni tradisi di Kota Semarang masih kurang memahami untuk mengembangkan atraksi budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman dengan tidak meninggalkan nilai tradisi yang ada.
4. Kurangnya kerjasama pemasaran bersama lintas regional (JOGLOSEMAR).
5. Koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.
6. Belum optimalnya partisipasi paguyuban/asosiasi/perhimpunan usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata.
7. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan atraksi wisata baru.
8. Kurangnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.

Adapun tindak lanjut dan solusinya yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan anggaran dari DID untuk membantu perekonomian para musisi dengan membuat kegiatan kompilasi 30 musisi secara virtual selain itu juga untuk memberikan apresiasi para musisi untuk tetap berkarya di masa pandemi dan memberikan stimulan beberapa sanggar tari dan seni musik tradisional dengan mengadakan kegiatan festival tari semarangan yang ditayangkan secara virtual, para seniman tetap dapat berekspresi dan berkreativitas.
2. Penerbitan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Cagar Budaya.
3. Mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop tentang pengembangan atraksi budaya tradisi.
4. Peningkatan jejaring pemasaran bersama lintas regional (JOGLOSEMAR).
5. Mendorong pertemuan penggiat wisata melibatkan stakeholder pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media).
6. Konsolidasi dan sosialisasi program pembangunan pariwisata kepada paguyuban/asosiasi/perhimpunan.
7. Memperkuat fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pokdarwis dan rintisan wisata.
8. Mengadakan peningkatan kapasitas kepada SDM pariwisata yang ada di pokdarwis dan desa wisata.

2. Tahun 2021

Anggaran sebesar Rp 65.512.632.974,- realisasi sebesar Rp 59.826.237.622,- dengan persentase pertumbuhan anggaran sebesar 62,22% dan pertumbuhan realisasi sebesar 64,91 % maka dapat disimpulkan anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan tingkat serapan anggaran pada tahun 2021 berada pada kategori tinggi atau sangat baik yakni sebesar 91,32%.

Pemerintah Kota Semarang menggunakan SIMDA yang leading sektornya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2021 ada permasalahan atau kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tempat pertunjukan seni budaya yang representatif.
2. Belum terpeliharanya artefak dan cagar budaya dengan baik.
3. Semakin menurunnya minat masyarakat dalam mengapresiasi atraksi seni budaya.
4. Belum optimalnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam pembangunan kebudayaan.
5. Belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan Kota Semarang.
6. Belum optimalnya kerjasama antara komunitas seni budaya dengan pelaku pariwisata.
7. Belum optimalnya kerjasama antar asosiasi pariwisata.
8. Belum optimalnya penjualan paket wisata pada desa wisata.
9. Belum optimalnya pemangku wilayah dalam perintisan tempat wisata.

Adapun tindak lanjut dan solusinya yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan tempat pertunjukkan seni budaya yang representatif di Taman Budaya Raden Saleh.
2. Pembangunan museum kota lama.
3. Pengemasan atraksi seni budaya yang modern dan kekinian tanpa meninggalkan tradisi yang ada.
4. Konsolidasi dan sosialisasi program dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang pembagnunan kebudayaan.
5. Mengadakan jasa konsultasi dengan menyusun kajian target pasar wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang.
6. Memfasilitasi kerjasama dengan komunitas seni budaya bersama pelaku pariwisata untuk menghasilkan paket atraksi budaya.
7. Memfasilitasi kerjasama antar asosiasi pariwisata untuk melakukan pemasaran pariwisata bersama.
8. Pelatihan kapasitas SDM desa wisata untuk membuat produk wisata.
9. Pelibatan pemangku wilayah dalam perintisan wisata baru yang dikelola masyarakat.

3. Tahun 2022

Anggaran sebesar Rp 51.036.109.999,- realisasi sebesar Rp 46.684.619.391,-. dengan persentase pertumbuhan anggaran sebesar -22,10% dan pertumbuhan realisasi sebesar -21,97% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2021, maka dapat disimpulkan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 mengalami penurunan, namun tingkat serapan anggaran berada pada kategori tinggi atau sangat baik yakni sebesar 91,47%.

Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri sehingga ada penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada Keputusan Menteri ini sudah ditentukan kinerja, indikator dan satuannya.

Pada tahun 2022 ada permasalahan atau kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya minat masyarakat dalam mengapresiasi atraksi seni budaya.
2. Belum tersedianya *story telling* terhadap penemuan benda cagar budaya.
3. Belum adanya generasi penerus dalang wayang potehi.
4. Belum optimalnya apresiasi penggiat seni budaya terhadap pembangunan kebudayaan.
5. Belum optimalnya koleksi museum.
6. Belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan mancanegara Kota Semarang.
7. Belum optimalnya kolaborasi seni budaya untuk atraksi wisata sebagai salah satu daya tarik wisatawan.
8. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
9. Belum optimalnya masyarakat dalam perintisan tempat wisata.
10. Belum optimalnya penjualan paket wisata pada desa wisata.

Adapun tindak lanjut dan solusinya yaitu sebagai berikut :

1. Menginventarisasi dan menyeleksi seni budaya lokal untuk dimasukkan di *calendar of event,* misalnya nyadran kali dan memetri kampung jawa dinaikkan ke *event* tingkat kota.
2. Membuat *story telling* tentang cagar budaya dengan melibatkan masyarakat lokal dan tenaga ahli.
3. Mengadakan kegiatan wayang potehi berkelanjutan untuk menghasilkan dalang wayang potehi generasi baru.
4. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi tokoh/pelaku seni budaya agar lebih masif lagi.
5. Melakukan negosiasi dengan para pemilik benda bersejarah untuk ditampilkan di museum.
6. Mengadakan jasa konsultasi dengan menyusun kajian target pasar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Semarang.
7. Mendorong kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya untuk berkarya atau tampil pada penyelenggaraan atraksi wisata di desa wisata dan di daya tarik wisata.
8. Memfasilitasi menciptakan paket wisata dan berkolaborasi antar daya tarik wisata untuk mendorong kunjungan wisatawan.
9. Lebih banyak melibatkan masyarakat dalam menawarkan produk paket wisata kepada Biro Perjalanan Wisata supaya masyarakat lebih berkolaborasi dalam kepariwisataan.
10. Menambah rintisan obyek wisata dan pemaketan wisata.

4. Tahun 2023

Anggaran sebesar Rp 62.040.967.222,- realisasi sebesar Rp 58.026.705.904,- dengan persentase pertumbuhan anggaran sebesar 21,56% dan pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 24,30% maka dapat disimpulkan pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran mengalami peningkatan dengan tingkat serapan anggaran sebesar 93,53% yang menunjukan bahwa tingkat serapan tinggi dan sangat baik.

Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.

Pada tahun 2023 ada permasalahan atau kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
2. Belum optimalnya sosialisasi terhadap penemuan benda cagar budaya.
3. Belum adanya rintisan kampung budaya.
4. Belum optimalnya keberadaan museum kota lama.
5. Belum optimalnya minat generasi muda terhadap wayang potehi.
6. Belum optimalnya sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
7. Belum optimalnya sosialisasi terhadap penemuan benda cagar budaya.
8. Belum adanya rintisan kampung budaya.
9. Belum optimalnya keberadaan museum kota lama.
10. Belum optimalnya minat generasi muda terhadap wayang potehi.

Adapun tindak lanjut dan solusinya yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
2. Peningkatan sosialisasi penemuan benda cagar budaya.
3. Perintisan kampung budaya.
4. Promosi secara masif museum kota lama.
5. Menampilkan wayang potehi dalam setiap kesempatan pertunjukkan event seni budaya.
6. Perlunya pengembangan pasar melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu *instragram*, *youtube*, *twitter* dan *facebook* dan pemasaran *offline* ke luar negeri.
7. Sinkronisasi dan koordinasi dengan Bappeda Kota Semarang untuk perintisan kampung tematik sebagai daya tarik wisata.
8. Pemaketan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata.
9. Peningkatan tata kelola melalui pelatihan dan kunjungan lapangan.
10. Peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam menyangga keberadaan daya tarik wisata di wilayahnya.

5. Tahun 2024

Anggaran sebesar Rp 49.095.886.687,- realisasi sebesar Rp 46.628.626.040,- dengan persentase pertumbuhan anggaran sebesar -20,87% dan pertumbuhan realisasi anggaran sebesar -19,64% dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, namun tingkat serapan anggaran pada tahun 2024 menunjukan bahwa tingkat serapan tinggi dan sangat baik yaitu sebesar 94,97%.

Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.

Pada tahun 2024 ada permasalahan atau kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh seni budaya asing mengancam eksistensi seni budaya tradisional.
2. Pengaruh globalisasi komersialisasi dapat mengancam keberlanjutan cagar budaya.
3. Kurangnya regenerasi pada pembuat, pemain, penonton dan penanggap wayang.
4. Kurangnya pembaruan dan inovasi pada penyelenggaraan seni budaya tradisional.
5. Kurangnya media dan *platform* menampilkan konten seni budaya.
6. Belum optimalnya pengemasan atraksi wisata.
7. Belum optimalnya diversifikasi produk wisata.
8. Kualitas pelayanan wisata yang belum merata.
9. Kompetensi sumber daya manusai pariwisata yang belum merata.
10. Promosi pariwisata yang belum semua bisa menjangkau target pasar.

Adapun tindak lanjut dan solusinya yaitu sebagai berikut :

1. Pemberdayaan bagi pelaku seni budaya untuk berinovasi karya seni budaya sehingga seni budaya tradisional tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas aslinya.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap komersial yang merusak cagar budaya dengan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi pelajar terkait teknik pembuatan, permainan dan penanggapan wayang serta menyelenggarakan festival wayang tingkat pelajar.
4. Melakukan kolaborasi antara seni budaya tradisional, kontemporer dan modern serta mengadaptasi teknologi seperti penggunaan multimedia sehingga penyelenggaraan seni budaya tradisional lebih menarik dan relevan.
5. Menjalin kerjasama dengan media sosial dan *platform streaming* serta pemanfaatan media sosial sebagai media informasi sehingga konten seni budaya menarik dan mudah diakses.
6. Pelatihan pengemasan atraksi dan paket wisata untuk masyarakat pelaku wisata.
7. Merintis wisata baru yang dikelola masyarakat dan mendorong investasi.
8. Pelatihan sumber daya manusia pariwisata untuk masyarakat pelaku wisata.
9. Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata sesuai prioritas.
10. Meningkatkan jangkauan promosi dengan kombinasi media offline dan online.

5. Tahun 2025

Anggaran sebesar Rp 48.907.560.401,04,- realisasi anggaran sampai bulan Agustus 2025 sebesar Rp 21.719.102.854,-. dengan realisasi sebesar 44,41% per bulan Agustus 2025.

Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan demikian menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.

c. Mitra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memberikan pelayanan dengan mitra Perangkat Daerah, asosiasi dan *stakeholder* terkait antara lain yaitu sebagai berikut :

I. Akademisi antara lain sebagai berikut :
   1. Universitas Dian Nuswantoro
   2. Universitas Semarang
   3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata
   4. Universitas Stikubank Semarang
   5. Lembaga Sertifikasi Profesi Guna Dharma
   6. Graha Wisata
   7. Universitas Diponegoro
   8. Universitas Islam Negeri Walingsongo Semarang
   9. Universitas Negeri Semarang
   10. Universitas PGRI Semarang
   11. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
   12. Universitas Ivet Semarang

II. Bisnis antara lain sebagai berikut :
   1. Daya Tarik Wisata
   2. Hotel
   3. Mall
   4. Biro Perjalanan
   5. Karaoke
   6. Spa
   7. Tempat Hiburan
   8. Desa Wisata

III. Pemerintahan antara lain sebagai berikut :
   1. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
   2. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
   3. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
   4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
   5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
   6. Dinas yang membidangi kebudayaan se-KEDUNGSEPUR
   7. Dinas yang membidangi pariwisata se-KEDUNGSEPUR
   8. Dinas Kebudayaan Yogyakarta dan Solo
   9. Dinas Pariwisata Yogyakarta dan Solo
   10. OPD Pemerintah Kota Semarang

IV. Komunitas antara lain sebagai berikut :
   1. Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL)
   2. Generasi Pesona Indonesia (GenPI)
   3. Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata (SiBarista)
   4. Paguyuban Entertainment Semarang (Pager Semar)
   5. Asosiasi Cafe dan Resto
   6. Pokdarwis

V. Media antara lain sebagai berikut :
   1. Jateng Pos
   2. Radar Semarang
   3. RRI
   4. Tribun Jateng
   5. Jawa Pos
   6. *Influencer*

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Untuk mencapai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendapat dukungan dari PT Taman Satwa Semarang (Semarang Zoo) dalam meningkatkan kunjungan wisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Semarang Zoo merupakan salah satu daya tarik wisata edukasi dan rekreasi keluarga di Kota Semarang dengan menyediakan wahana taman satwa, area bermain anak, pengenalan koleksi satwa termasuk spesies langka seperti orang utan, harimau Sumatra dan burung endemik. Selain itu di Semarang Zoo juga ada konservasi satwa antara lain sitatunga, capibara dan burung pelikan. Semarang Zoo salah satu paket *city tour* di Kota Semarang. Semarang Zoo menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari tiket masuk, sewa tempat dan sponsor serta *multiplayer effect* dari wisatawan yang berkunjung yaitu pada sektor transportasi, hotel dan restoran.

e. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain kerja sama dalam sektor kebudayaan dan pariwisata memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara efektif dan efisien guna meningkatkan pemasaran pariwisata dan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian alam serta lingkungan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan pengenalan kebudayaan Kota Semarang, pertukaran informasi, pengalaman dan pengetahuan dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang dapat meningkatkan aksesibilitas pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian budaya serta meningkatkan aksesibilitas promosi dan pengembangan potensi pariwisata guna mewujudkan pemajuan kebudayaan dan pengembangaan kepariwisataan berkelanjutan.

Dalam hal *branding*, upaya yang dilakukan untuk menyatukan citra pariwisata dari berbagai daerah akan memperkuat daya tarik wisata. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi fokus utama, dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal agar sektor pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan infrastruktur pariwisata, seperti akses transportasi dan fasilitas umum, akan memudahkan mobilitas wisatawan dan mendukung kenyamanan serta kualitas pengalaman wisatawan. Adapun kerja sama yang sudah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Pengembangan Pariwisata Nomor : B/2713/556/IX/2021 dan Nomor : 79/PKS.YK/PLH.26/SEP/2021 pada tanggal 16 September 2021.
2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tentang Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan Nomor : PE.02.02/2447/III/2023 dan Nomor : B/1310/556/III/2023 pada tanggal 27 Maret 2023.
3. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tentang Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah KEDUNGSEPUR Nomor : 556/995/2023, Nomor : 415.4/32/KB/III/2023, Nomor : 556/0318/2023, Nomor : 500.13/220, Nomor : B/1121/556/III/2023 dan Nomor : 556/546/E/2023 pada tanggal 2 Mei 2023.

f. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 sampai dengan 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Lunpia

   Smart tourism penggerak kepariwisataan di Kota Semarang. Digital platform pariwisata untuk mempermudah wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkeliling Kota Semarang. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2021.

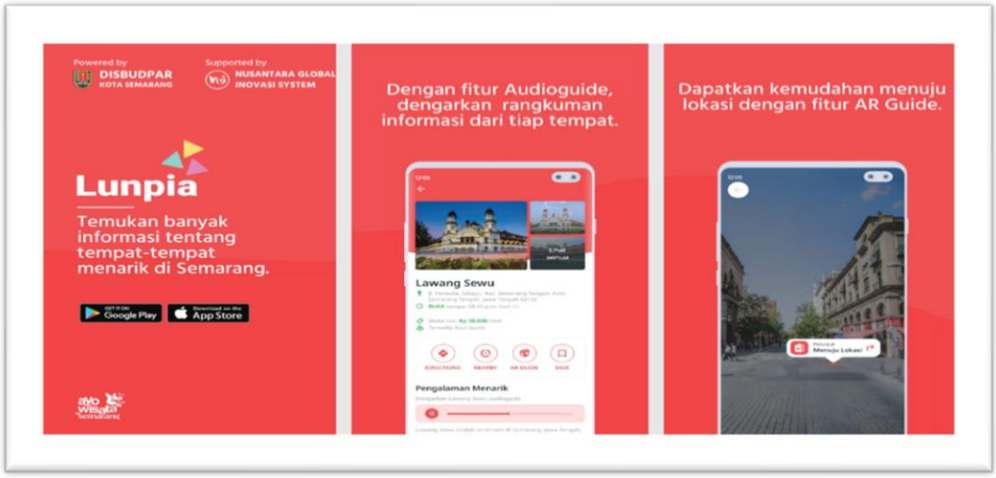

2. *Ecology Education Tourism* Pantai Mangunharjo

   Merupakan inovasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kecamatan Tugu. *Ecology Education Tourism* Pantai Mangunharjo memiliki konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mendasarkan pada prinsip pembangunan ekowisata, yaitu mengkombinasikan kepentingan industri pariwisata dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk pelibatan masyarakat setempat. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2021.

3. JARUM SI KENANG (Jejaring Komunitas Musisi Keroncong Semarang)

   JARUM SI KENANG merupakan salah salah satu inovasi sekaligus komunitas yang dinaungi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Komunitas ini merupakan wadah bagi para musisi keroncong di Kota Semarang yang bertujuan untuk melestarikan musik keroncong yang saat ini semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, keberadaan komunitas ini juga diharapkan menjadi daya tarik kunjungan pariwisata di Kota Semarang melalui parade dan event musik keroncong yang diselenggarakan. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2022.

4. Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata

   Masih terkait sektor pariwisata, program Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata merupakan program kerja Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pengembangan potensi-potensi lokal untuk menjadi daya tarik wisata melalui giat pariwisata seperti pelatihan wisata, diskusi, transfer ilmu, *best practices*, dan lain-lain. Pelibatan berbagai sektor kalangan mulai dari akademisi, pelaku wisata, pemerintah, sektor bisnis, dan warga masyarakat menjadi kunci dalam giat pariwisata ini. Diharapkan program kerja tersebut dapat menginisiasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang belum berkembang atau sedang dalam tahap rintisan. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2022.

5. Kopi Jarik's (Kolaborasi Pariwisata Jejaring Kota Semarang)
   Kolaborasi Pariwisata Jejaring Kota Semarang merupakan inovasi yang bertujuan menjadi jembatan kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata khususnya di sektor hotel dan resto terutama dalam bidang MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, dan Exhibitions*). Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2023.
6. Si Kembang Asem (Sinergitas Ekosistem Kesenian Gambang Semarang)
   Merupakan inovasi di bidang seni yang dilakukan sebagai upaya pelestarian pemajuan kebudayaan kearifan lokal di Kota Semarang. Inovasi ini dilakukan dengan tujuan supaya terlaksana kegiatan Gambang Semarang secara berkala dan Kesenian Gambang Semarang masuk dalam kurikulum pendidikan. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2023.
7. Simkraf
   Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Semarang) Kota Semarang adalah sistem informasi yang diperuntukan sebagai *platform* pendataan bagi pelaku 17 sub ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang serta sebagai media informasi ekosistem pendukung ekonomi kreatif lainnya. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2024.
8. KoncoDolan
   Aplikasi Koncodolan mempermudah wisatawan atau warga lokal untuk berwisata Semarang sehingga dapat meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang. Koncodolan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti teman bermain. Selain sebagai informasi wisata Semarang, aplikasi ini memiliki fitur menarik seperti game interaktif seputar wisata Semarang, fitur fasilitas reservasi yang memudahkan wisatawan dan warga lokal untuk berlibur serta menawarkan pembayaran secara *cashless*. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2024.

9. *Quality Tourism* (Gemerlap Wayang Dahsyat)
   Strategi implementasi pariwisata berkualitas dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Semarang yang biasa disebut dengan gemerlap wayang dahsyat. Bertujuan untuk mengarahkan pembangunan sektor pariwisata di Kota Semarang agar lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing, dengan tetap memperhatikan kebutuhan rekreasi masyarakat serta potensi lokal. Adapun strategi implementasi pariwisata berkualitas ini berpedoman pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2024 tentang *Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas* ditetapkan dan diundangkan pada 26 Juli 2024. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2024.

g. Penghargaan Perangkat Daerah

Penghargaan yang di terima atas prestasi yang telah diraih oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yaitu sebagai berikut :
Penghargaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Konser musik *Drive In* pertama di Indonesia diadakan di Kota Semarang diapresiasi oleh Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia (LEPRID).
2. Penghargaan ASEAN *Clean Tourist City Standard* 2020-2022.
3. Juara I Lomba Inovasi Daerah "*New Normal*" Sektor Wisata yang diadakan oleh Badan Litbang Kemendagri.
4. Juara III Lomba Inovasi Daerah "*New Normal*" Sektor Hotel yang diadakan oleh Badan Litbang Kemendagri.

Penghargaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. *Gold Winner REI Award* atas penghargaan tertinggi Kota Lama Semarang perihal proses peremajaan atau revitalisasi Kota Lama Semarang kategori *Heritage* yang diselenggarakan oleh FIABCI (Federasi Realestate Dunia) secara *hybrid* dan *daring* pada tanggal 25 Januari 2021.

2. Penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Gedung Sapta Pesona Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2021.

3. Penghargaan Kartika Pamong Praja Muda atas langkah kinerja Inovasi selama menghadapi pandemi *covid 19* dengan mendesain ulang sektor Pariwisata Kota Semarang selama masa *New Normal* yang diselenggarakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 20 April 2021.

4. Penghargaan *Green Leadership* Nirwaita Tantra 2020, Kategori Pemerintah Daerah Kota Besar dengan peringkat kedua yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Juni 2021.

5. Juara Harapan 3 Trisakti Award Kategori Alam Desa Wisata Kandri yang diselenggarakan oleh Trisakti Award di Kota Semarang pada tanggal 26 Agustus 2021.

6. Juara I Terbaik dalam stand pameran terbaik Festival Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tanggal 10 September 2021.

7. Penyaji Terbaik kedua dalam kegiatan Penyaji Terbaik yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 September 2021.

8. *Tourism and Creative Campaign* 2021 sebagai bentuk apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dan Industri Kreatif yang diselenggarakan oleh MarkPlus *Tourism* pada tanggal 28 September 2021.

9. Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Kategori Favorit yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah di Hotel Mexiole Kebumen pada tanggal 28 Oktober 2021.

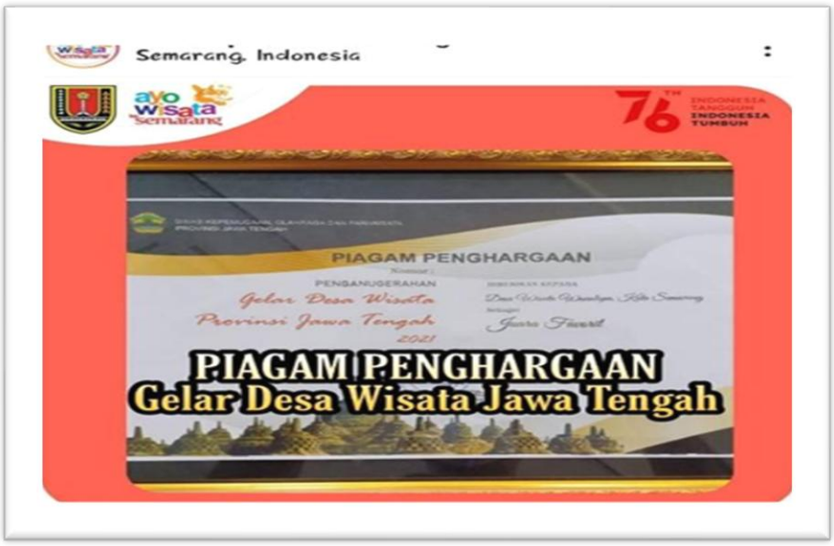

Penghargaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Lima Penyaji Terbaik Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah secara *virtual*, yang diselenggarakan Badan Penghubung Jawa Tengah TMII Jakarta.
2. Juara Kategori Paket Wisata Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2022 Kepada Desa Wisata Kandri, yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Penghargaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. *Entrepreneurial Marketing* Kategori *Public Services Of The Year* Jawa Tengah 2023 yang diselenggarakan oleh 11TH *Indonesia Marketing Festival* di Hotel Graha Santika pada tanggal 3 Agustus 2023.

2. Juara II Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2023 Kategori Minuman Tradisional (Jamu Jun) dalam kompetisi Anugerah Pesona Indonesia Ke-8 (API Award) yang diselenggarakan oleh Ayo Jalan Jalan Indonesia X Kemenparekraf di Plaza Presisi Manise, Kota Ambon pada tanggal 1 November 2023.

3. Juara II Stand Terbaik Tingkat Kota Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam kompetisi Gebyar Wisata Nusantara yang diselenggarakan oleh PT Wahyu Promo Citra di SMECO *Exhibition Hall* Jakarta pada tanggal 11-23 Juni 2023.

4. Juara Harapan II Stand Terbaik Kategori Pemerintahan dalam kompetisi Festival UMKM *Expo* yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan Kabupaten Semarang di Gedung Serbaguna Ungaran pada tanggal 15-19 Maret 2023.

5. Juara II Stand Terbaik Batu Bisnis Festival dalam kompetisi Batu Bisnis Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu di Balaikota Among Tani Kota Batu pada tanggal 22-25 Juni 2023.

6. Penyaji Terbaik 2 Event Bersama Kedung Sepur dalam Event Bersama KEDUNG SEPUR yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada 20 Mei 2023.

7. Juara II Kategori Umum Magelang *Ethno Carnival* dalam kompetisi Magelang *Etno Carnival* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang di Kota Magelang pada tanggal 24 September 2023.

8. Potehi dari Provinsi Jawa Tengah sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Kota Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023.

9. Juara I dalam Lomba Pengelola Website Pemerintah Kota Semarang Kategori Organisasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tanggal 2 Mei 2024.

10. Juara I Karnaval Budaya Nusantara Rangkaian APEKSI XVII Kota Balikpapan 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tanggal 6 Juni 2024.

11. Penghargaan *Inspiring Profesional & Leadership Award* 2024 yang diselenggarakan Indonesia Award Magazine pada tanggal 15 Juni 2024.

12. Pemenang Lomba Video Kreatif BBWI kategori Destinasi Wisata Unggulan dalam ajang Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2024.

13. Pemenang Lomba Video Kreatif BBWI kategori Seni dan Budaya dalam ajang Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2024.

14. Pemenang Lomba Video Kreatif BBWI kategori Event Daerah dalam ajang Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2024.

15. Penghargaan Prastisha Pustaka dalam ajang Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Award 2024 yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin pada tanggal 19 September 2024 yang digelar di Ballroom Calamus, Rattan In Hotel, Banjarmasin.

16. Juara I Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia Kabupaten/Kota terbaik tingkat nasional dalam ajang Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABWI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada 13 Desember 2024.

17. Penghargaan Penyaji Unggulan Pentas Duta Seni Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah Tahun 2024 dalam ajang Duta Seni Award Tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Grandhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 23 Desember 2024.

18. *Semarang Night Carnival* raih apresiasi di Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan tema dari APEKSI untuk negeri yang di gelar di Kota Surabaya pada tanggal 6-10 Mei 2025. Sebagai bentuk Apresiasi terhadap peserta karnaval budaya dalam rangka Munas Apeksi ke 7 di Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya memberikan apresiasi kepada 5 kota yang memberikan Performa terbaik, dari sisi kesesuaian tema maupun ketertiban berupa hadiah.
    Apresiasi 5 peserta terbaik non ranking diberikan kepada :
    1. Kota Palangka Raya
    2. Kota Medan
    3. Kota Tasikmalaya
    4. Kota Semarang
    5. Kota Kediri

19. Trisakti Tourism Award 2025 memberikan penghargaan kepada desa wisata Kampung Melayu kategori warisan sejarah yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel – Jakarta pada tanggal 9 Mei 2025.

20. Trisakti Tourism Award 2025 memberikan penghargaan kepada desa wisata Wonolopo kategori wisata kuliner yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel – Jakarta pada tanggal 9 Mei 2025.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

1. Banyak bangunan bersejarah dan cagar budaya di Kota Lama dan kawasan lain menghadapi kerusakan fisik akibat usia dan keterbatasan pemeliharaan.
2. Tradisi, seni pertunjukan, dan bahasa lokal mulai tergerus modernisasi dan rendahnya minat generasi muda.
3. Apresiasi publik terhadap karya seni lokal belum sebanding dengan potensi yang ada.
4. Invasi budaya asing yang semakin menggerus kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa, misalnya budaya K-pop.
5. Perkembangan kota besar menimbulkan risiko alih fungsi ruang budaya menjadi area komersial.
6. Nilai kearifan lokal dan tradisi lisan perlahan berkurang karena pergeseran gaya hidup urban.
7. Pengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
8. Kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata belum merata dan belum adil.
9. Kapasitas Sumber Daya Manusia kebudayaan, baik seniman, komunitas, maupun aparatur, belum merata dari sisi kualitas dan jumlah.
10. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya, termasuk minimnya regenerasi komunitas budaya.
11. Persaingan antar daerah terkait kualitas daya tarik destinasi.
12. Kota Semarang harus mampu bersaing dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Tengah maupun DIY seperti Solo dan Karimunjawa serta Yogyakarta yang lebih dulu dikenal sebagai pusat wisata.

13. Citra pariwisata Kota Semarang masih sering kalah populer dibanding destinasi di sekitar Jawa Tengah seperti Solo, Karimunjawa dan Yogyakarta.
14. Daya tarik wisata unggulan Kota Semarang seperti Kota Lama dan Lawang Sewu mengalami lonjakan kunjungan wisata yang berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisata.
15. Tren pariwisata yang semakin *digital* dan *personal*, *more digital* dan *more personal*.
16. Promosi wisata belum sepenuhnya terintegrasi dengan konsep *smart tourism* dan *digital marketing*.
17. Belum optimalnya peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan dan promosi daya tarik wisata dan seni budaya lokal.
18. Belum memadainya sarana dan prasarana di taman lalu lintas dan wisata ramah anak seperti toilet anak.
19. Dampak lingkungan pariwisata dapat menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan.
20. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan kebersihan di kawasan wisata pada saat event atau musim liburan.
21. Ancaman banjir atau rob dan kerusakan lingkungan pesisir bisa mengurangi daya tarik wisata bahari dan *heritage*.
22. Keberlanjutan lingkungan sebagai tren perjalanan.
23. Penyediaan infrastruktur yang ramah anak dan ramah difabel.
24. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
25. Penurunan pravelansi stunting melalui kegiatan wisata edukasi gizi.
26. Belum semua objek wisata memiliki standar pelayanan yang baik yang meliputi akses, kebersihan, sanitasi dan pemandu wisata serta ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender yaitu layanan pengaduan kekerasan yang merupakan salah satu variabel dari indikator atau komponen pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
27. Kapasitas Sumber Daya Manusia kepariwisataan meliputi pemandu wisata, pelaku usaha, pengelola daya tarik wisata belum merata dari sisi kompetensi pelayanan wisatawan.

b. Peluang

Peluang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya sebagai berikut :

1. Leadership Kepala Daerah yang menjadikan budaya dan pariwisata sebagai sektor prioritas.
2. Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah sekaligus simpul transportasi (bandara internasional, pelabuhan, tol trans-Jawa dan jalur kereta) sehingga sangat mudah dijangkau wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
3. Sinergi dengan pariwisata nasional dan regional.
4. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan kinerja lain di bidang pelaku seni, sanggar seni, apresiasi terhadap kesenian lokal dan pelestarian warisan cagar budaya juga menunjukkan tren yang positif.
5. Kota Semarang memiliki warisan budaya Jawa, Tionghoa, Arab, Belanda, dan etnis lain yang bisa dijadikan basis identitas kota multikultural.
6. Kawasan Kota Lama sebagai Simbol Warisan Dunia.

7. Penetapan Kota Lama dalam daftar tentative list UNESCO membuka peluang untuk meningkatkan reputasi global Semarang sebagai kota warisan budaya.
8. Revitalisasi kawasan bersejarah dapat mendorong kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, komunitas, media dan akademisi).
9. Festival Kota Lama, Semarang Night Carnival, Dugderan dan event kuliner bisa menjadi magnet wisata yang berkelanjutan.
10. Seni pertunjukan, kriya, batik Semarangan, kuliner tradisional, hingga film dan musik lokal dapat menjadi penggerak ekonomi baru berbasis kebudayaan.
11. Dukungan teknologi digital membuka ruang pemasaran global untuk produk budaya.
12. Tersedianya infrastruktur *digital* untuk pemasaran pariwisata, sudah tidak ada *blank spot*.
13. Kuliner khas Kota Semarang seperti lumpia, tahu gimbal, wingko dan bandeng presto yang sudah menjadi *culinary brand* nasional.
14. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat.
15. Kapal pesiar sudah mulai diijinkan berlabuh di Tanjung Mas meskipun intensitasnya belum terlalu sering.
16. Potensi MICE *tourism* (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) dengan dukungan hotel berbintang dan fasilitas pertemuan.
17. Akses dan konektivitas bandara internasional dengan penumpang lebih dari 2,2 juta penumpang per tahun.
18. Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti *leaflet*, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan *website* serta melalui sosial media dan paket wisata lainnya.
19. Daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.
20. *Co-Working Space* gratis untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
21. Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
22. Hubungan antar *stakeholder* pariwisata yang harmonis dan sinergis dengan adanya komunitas wisata yang saling berkolaborasi dengan UMKM.
23. Dukungan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.
24. Tersedianya *Big Data* yang dapat dimanfaatkan untuk melihat tren masyarakat.
25. Banyaknya varian daya tarik wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
26. Pariwisata digital integrasi teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, contohnya penggunaan aplikasi perjalanan dan teknologi berbasis kecerdasan buatan.
27. Pariwisata kesehatan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas untuk wisatawan yang mencari perawatan medis. Mendorong pengembangan *wellness tourism* sebagai program unggulan dengan tujuan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
28. Pengembangan pariwisata yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan.
29. Generasi muda kreatif dapat mengembangkan konten pariwisata seperti foto, video dan *virtual tour* untuk memperkuat branding kota.
30. Masuk dalam jaringan kerjasama Joglosemar (Jogja, Solo dan Semarang) membuka peluang integrasi paket wisata.
31. Masuk dalam jaringan Kerjasama KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi) membuka peluang integrasi paket wisata.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi *riil* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Permasalahan pembangunan daerah yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 antara lain yaitu “Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang Perlu Dioptimal”, dengan masalah belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal dan akar permasalahan yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu pengembangan objek wisata di Kota Semarang belum optimal, masih kurangnya aktivitas promosi terkait pariwisata dan budaya Kota Semarang dan pengembangan potensi ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu “Kontribusi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah pada Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rumusan Permasalahan
Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Semarang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	
1	Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya	1	Belum optimalnya pelibatan komunitas atau masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya
		2	Pergeseran pola pikir masyarakat ke arah budaya populer modern yang dianggap lebih praktis dan menarik
		3	Belum optimalnya pembinaaan melalui pemanfaatan ruang publik seperti taman budaya dan museum untuk kegiatan edukatif dan promosi budaya
2	Keterbatasan sumber daya dalam pelestarian kesenian	4	Kurangnya regenerasi tenaga pelestari seni budaya karena minat generasi muda rendah pada pelestarian seni budaya
		5	Terbatasnya ruang kreatif pertunjukan seni budaya
		6	Belum optimalnya pembinaan kelompok/sanggar seni

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	
3	Belum optimalnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya	7	Belum seluruh objek cagar budaya benda yang memenuhi kriteria cagar budaya terdata dan ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya
		8	Belum seluruh objek cagar budaya tak benda yang memenuhi kriteria cagar budaya terdata dan ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya
4	Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata	9	Belum maksimalnya pengemasan potensi daya tarik objek wisata secara kreatif dan inovatif
		10	Infrastruktur penunjang wisata (parkir, kebersihan, petunjuk arah, transportasi ramah wisatawan) masih kurang memadai
		11	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya secara resmi
5	Masih kurangnya aktivitas promosi terkait budaya dan pariwisata Kota Semarang	12	Belum optimalnya kerjasama budaya dan pariwisata dengan Kabupaten/Kota lainnya
		13	Belum optimalnya keterlibatan *stakeholder* (media, komunitas, pelaku usaha dan akademisi) dalam upaya promosi budaya dan pariwisata Kota Semarang
		14	Belum optimalnya efektivitas media promosi
		15	Belum optimalnya penjualan paket wisata pada desa wisata dan daya tarik wisata
6	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif	16	Rendahnya kapasitas SDM ekonomi kreatif terutama dalam tata kelola kepariwisataan
		17	Belum optimalnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional
		18	Belum optimalnya kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif
7	Belum optimalnya kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19	Belum optimalnya pelaporan kinerja perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		20	Belum optimalnya pelaporan keuangan dan aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		21	Belum optimalnya sarana dan prasaran serta kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka permasalahan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya.
2. Keterbatasan sumber daya dalam pelestarian kesenian.
3. Belum optimalnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya.
4. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata.
5. Masih kurangnya aktivitas promosi terkait budaya dan pariwisata Kota Semarang.
6. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif.
7. Belum optimalnya kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat dilakukan dengan menganalisis capaian kinerja dan memperhatikan faktor internal serta eksternal. Berdasarkan analisa terhadap tantangan yang dihadapi Kota Semarang, ditemukan akar permasalahan utama antara lain yaitu :

1. Belum optimalnya pelibatan komunitas atau masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya.
2. Pergeseran pola pikir masyarakat ke arah budaya populer modern yang dianggap lebih praktis dan menarik.
3. Belum optimalnya pembinaaan melalui pemanfaatan ruang publik seperti taman budaya dan museum untuk kegiatan edukatif dan promosi budaya.

4. Kurangnya regenerasi tenaga pelestari seni budaya karena minat generasi muda rendah pada pelestarian seni budaya.
5. Terbatasnya ruang kreatif pertunjukan seni budaya.
6. Belum optimalnya pembinaan kelompok/sanggar seni.
7. Belum seluruh objek cagar budaya benda yang memenuhi kriteria cagar budaya terdata dan ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya.
8. Belum seluruh objek cagar budaya tak benda yang memenuhi kriteria cagar budaya terdata dan ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya.
9. Belum maksimalnya pengemasan potensi daya tarik objek wisata secara kreatif dan inovatif.
10. Infrastruktur penunjang wisata (parkir, kebersihan, petunjuk arah, transportasi ramah wisatawan) masih kurang memadai.
11. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya secara resmi.
12. Belum optimalnya kerjasama budaya dan pariwisata dengan Kabupaten/Kota lainnya.
13. Belum optimalnya keterlibatan stakeholder (media, komunitas, pelaku usaha dan akademisi) dalam upaya promosi budaya dan pariwisata Kota Semarang.
14. Belum optimalnya efektivitas media promosi.
15. Belum optimalnya penjualan paket wisata pada desa wisata dan daya tarik wisata.
16. Rendahnya kapasitas SDM ekonomi kreatif terutama dalam tata kelola kepariwisataan.
17. Belum optimalnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional.
18. Belum optimalnya kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
19. Belum optimalnya pelaporan kinerja perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
20. Belum optimalnya pelaporan keuangan dan aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
21. Belum optimalnya sarana dan prasaran serta kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu dari tingkat internasional, nasional, dan regional serta daerah. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam 5 (lima) tahun ke depan yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu identifikasi isu strategis sebagai berikut :

1) Isu Strategis Global

Banyaknya isu strategis pada lingkup global menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi di baik Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi

daerah, tak terkecuali Kota Semarang. Berikut merupakan isu strategis pada lingkup global yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yaitu sebagai berikut :

1. Geopolitik dan Geoekonomi

a) Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif. Perkembangan logi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *teknoHyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automstion* (RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, *3D*, dan *Future Technologies*. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Disrupsi teknologi akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan di masa depan, diantaranya yaitu tergantikannya industri media dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), termasuk pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) yang berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

2) Isu Strategis Nasional

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Kemampuan stakeholder di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan. Berikut merupakan isu strategis pada lingkup nasional yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yaitu sebagai berikut :

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Hal ini bisa berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

3) Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Selain isu global dan isu nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 juga menjadi perhatian agar kesinambungan pembangunan dapat selaras sampai dengan level kota. Berikut merupakan isu strategis pada lingkup Provinsi Jawa Tengah yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yaitu sebagai berikut :

1. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

   Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Transformasi ekonomi perlu dilaksanakan dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin, pengembangan ekonomi desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

2. Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jatidiri Masyarakat

   Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya. Pembangunan kualitas keluarga juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas berpotensi mempengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat diharapkan akan mampu menangkal segala untuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstreisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

4) Isu Strategis Daerah Kota Semarang

Hasil telaahan terhadap isu-isu global, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan regional serta isu strategis daerah, maka penetapan isu-isu strategis Kota Semarang pada pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia

    a. Pengembangan Ekonomi Kreatif

    Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang dapat dikatakan masih belum optimal meskipun potensinya sangat besar. Dari segi arsitektur kota, Kota Semarang memiliki ciri khas yang jarang ditemukan di tempat lain seperti Kawasan Kota Lama, Kawasan Pecinan, Kampung Tematik, Kampung Melayu, dan beberapa ikon wisata baik alam, budaya, maupun sejarah sebagai potensi bagi pengembangan ruang kreatif (*creative hub*). Keberadaan *creative* hub ini penting sebagai sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide-ide kreatif dari para penggiatnya seperti Taman Indonesia Kaya dan Taman Budaya Raden Saleh bagi pelaku seni pertunjukan, Semarang Digital Kreatif (SDK) bagi *start-up* lokal, dan lain sebagainya.

    Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi adalah banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya. Konsep wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) menjadi keunggulan tersendiri karena konsep ini baru diterapkan pada dua kota saja di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Berdasarkan data *International Congress and Convention Association* (ICCA), per Maret 2024, rata-rata tinggal wisatawan MICE mancanegara di Indonesia mencapai 7,37 hari sedangkan rata-rata di Kota Semarang baru mencapai 1,33 hari. Diharapkan, konsep MICE ini benar-benar didukung oleh infrastruktur seperti venue-venue yang lebih representatif sehingga Kota Semarang tidak lagi terlewat sebagai daftar penyelenggara pameran, pertemuan maupun konser skala nasional dan internasional di masa mendatang.

    Di sisi lain, pengembangan pariwisata baik secara kovensional maupun MICE diyakini dapat menjadi daya ungkit bagi komponen komponen ekonomi kreatif lainnya di Kota Semarang. Setiap wisatawan akan didorong untuk berkunjung ke lokasi dengan arsitektur khas maupun yang menyajikan seni pertunjukan, selain dapat membeli produk-produk ekonomi kreatif sebagai cinderamata. Sebagai informasi bahwa di Kota Semarang baru subsektor *fashion* yang mendapat predikat unggul dari Kemenparekraf. Hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi semua pihak untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dan juga promosi produk kreatif lokal Semarang yang notabene berbeda dari wilayah lainnya.

    Namun perlu digarisbawahi bahwa kondisi tersebut dapat tercapai apabila permasalahan terkait kapasitas SDM juga ditingkatkan. Masih banyak pelaku usaha kreatif pemula yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kesannya yang bebas dan informal sehingga akan menghambat keinginan dan juga perkembangan usahanya. Jumlah kursus, sanggar, maupun pelatihan penunjang juga masih kurang sehingga persentase tenaga kerja terampil di Kota Semarang juga menurun berdasarkan data statistik. Hal ini sangat disayangkan serta menjadi pekerjaan bagi pemerintah kota untuk terus mendorong jumlah dan kapasitas pelaku usaha agar dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif Kota Semarang.

b. Daya Saing Pariwisata

Secara geografis, letak Kota Semarang dekat dengan dua Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Pulau Karimunjawa dan Candi Borobudur. Setiap tahunnya banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang mengunjungi dua destinasi tersebut baik lewat jalur darat, udara dan juga laut. Hal ini sangat menguntungkan mengingat ketersediaan prasarana transportasi seperti bandara, pelabuhan dan stasiun membuat Kota Semarang sering dijadikan kota transit bagi wisatawan sebelum mengunjungi dua KSPN tersebut.

Namun demikian, masih banyak wisatawan yang singgah namun hanya untuk menunggu keberangkatan menuju dua destinasi tersebut tanpa berkunjung ke tempat-tempat wisata lokal di Kota Semarang. Banyak paket wisata juga masih menggabungkan antara destinasi di kota dan kabupaten, di mana Kota Semarang umumnya hanya mendapat jatah waktu singkat di akhir untuk kegiatan berbelanja atau sekedar istirahat di hotel. Hal ini menjadi sebuah kerugian karena daya tarik wisata di Kota Semarang lebih dari itu, seperti museum, situs dan kawasan cagar budaya serta perkampungan tradisional yang pastinya tidak ditemukan di wilayah lain. Potensi inilah yang harusnya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan sektor wisata sehingga wisatawan tertarik untuk menetap lebih lama dengan mengunjungi di tempat-tempat wisata lokal.

Pada masa libur lebaran tahun 2024, jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Lama tembus 289.000 pengunjung dan menjadi destinasi wisata paling diminati di Jawa Tengah. Dengan tingginya jumlah pengunjung tersebut, Kota Lama telah menjadi destinasi baru tujuan pelancong. Sejalan dengan hal tersebut, objek wisata lain di Kota Semarang harus ikut dikembangkan dan ditingkatkan promosinya agar sektor pariwisata di Kota Semarang semakin bersaing dengan destinasi wisata di kota lain.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat

Kesejahteraan masyakarat dalam hal ini tidak hanya dilihat dari segi kemakmuran saja, namun lebih jauh tentang pemenuhan individu akan kebutuhannya dalam hal sosial, spiritual dan tentunya material. Adapun perumusan isu ini mutlak dibutuhkan agar masyarakat Kota Semarang dapat hidup layak serta mampu mengembangkan dirinya. Dengan demikian, maka tiap individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik pada tingkat masyarakat, sebagai berikut :

a. Nilai Budaya dan Karakter Masyarakat
Selain kondisi kesejahteraan itu sendiri, pembahasan juga meluas pada nilai budaya dan karakter masyarakat yang terancam luntur. Pengelolaan kebudayaan, kepustakaan, serta kepemudaan dan olahraga masih harus menjadi perhatian pemerintah kota ke depannya. Jumlah pelaksanaan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut di Kota Semarang masih sangat rendah dan cenderung stagnan setiap tahunnya. Pengenalan seni dan budaya lokal, peningkatan minat baca, serta kegiatan kepemudaan yang bermanfaat tetap dirasa penting meskipun zaman sudah bergeser sehingga segala sesuatu menjadi berbasis *online*. Pemerintah kota tentunya harus beradaptasi terhadap kondisi tersebut sehingga

masyarakat khususnya generasi muda Kota Semarang tetap memegang teguh nilai budaya lokal dan karakter luhur bangsa di tengah arus globalisasi yang terjadi.

b. Inklusivitas
Dari segi inklusivitas, dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kota Semarang masih belum mampu secara optimal untuk mengakomodasi dan menghargai perbedaan secara merata, khususnya terkait gender. Secara agregat, meningkatkan Indeks Pembangunan Gender menjadi fokus bagi Kota Semarang untuk menunjukkan keseriusan terkait upaya pengarusutamaan gender. Hal tersebut dapat terwujud apabila upaya-upaya lain dilakukan secara paralel untuk meningkatkan kinerja yang masih rendah, seperti persentase keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan serta jumlah organisasi perempuan dan kebijakan responsif gender.

5) Isu Strategis RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 juga harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2025-2029. Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Sosial budaya, mencakup rendahnya akses terhadap layanan dasar sosial dan pelestarian budaya.
2. Ekonomi, mencakup ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya daya saing ekonomi kota.

Penanganan isu-isu ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan Kota Semarang dan meningkatkan kesiapannya menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim di masa depan.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut :

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tersebut mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan rasio gizi, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Adapun penjabaran visi pembangunan Kota Semarang 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Pusat Ekonomi yang Maju : Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas ekspor impor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial : Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari : Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang

bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif : Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai :

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif.
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif.
- Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2024.
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.
Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.
Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.
Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.
Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung Misi 4 yaitu "Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global".

Adapun *tagline* yang sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029 "Ekonomi Inklusif" dengan tujuan yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu "Meningkatnya Perekonomian Kota Yang Berkualitas, Inklusif Dan Berdaya Saing" dengan indikator tujuan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah" dengan indikator sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perdagangan dan Jasa.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang dalam mencapai indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Sedangkan tujuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" dengan indikator "Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" dan sasarannya sebagai berikut :

1. Pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan yaitu "Meningkatnya Peran Budaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat" yang dibagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut :
   1) Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan.
   2) Nilai Kemajuan Kebudayaan.
2. Pada urusan pemerintahan bidang pariwisata yaitu "Meningkatnya Peran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat" dengan indikator "Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif".
3. Pada urusan pemerintahan penunjang yaitu "Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata" yang dibagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut :

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2) Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perdagangan dan Jasa, berpedoman pada program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, di dukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
   Outcome program yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan.
   Indikatornya yaitu tingkat partispasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan.
   Adapun program prioritasnya yaitu penciptaan ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi aktivitas budaya dengan pengelolaan yang berpihak pada seniman.
2. Pengembangan Kesenian Tradisional
   Outcome program yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional.
   Indikatornya yaitu persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan.
   Adapun program prioritasnya yaitu peningkatan kesejahteraan seniman Kota Semarang melalui bantuan ekonomi dan penyelenggaraan kegiatan apresiasi seni.
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Outcome program yaitu meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata.
   Indikatornya yaitu persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan.
   Adapun program prioritasnya yaitu sebagi berikut :
   a. Menyelenggarakan event nasional dan internasional dengan melibatkan potensi lokal baik sumber daya manusia dan fasilitas yang ada untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara.
   b. Pengembangan desa wisata berbasis ekologi seperti pelestarian hutan, sungai, danau, dan pantai.

c. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Republik Indonesia

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengampu dua urusan yaitu urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Namun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang perlu memiliki keselarasan dengan 3 (tiga) kementerian yaitu, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Penelaahan masing-masing Rencana Strategis Kementerian adalah sebagai berikut :

1) Telaah Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mengampu urusan pemerintahan bidang kebudayaan dimana melaksanakan Prioritas Nasional 4 yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas”. Matriks Kinerja Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Matriks Kinerja
Pencapaian Indikator Program Prioritas
Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Taget 2025	Target 2029
1	Jumlah Karya Seni Budaya Yang Memperoleh Rekognisi Di Ajang Penghargaan Internasional	Karya seni budaya	15 (2023)	15	27
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Juta orang	57,13 (2023)	58,39	60,70

Sumber : Matriks Kinerja Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia

2) Telaah Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengampu urusan pemerintahan bidang pariwisata dimana melaksanakan Prioritas Nasional 3 yaitu "Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi". Matriks Kinerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Matriks Kinerja
Pencapaian Indikator Program Prioritas
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Taget 2025	Target 2029
1	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	USD/kunjungan	1.239 (2023)	1.300-1381,3	1.600-1.672
2	Tenaga Kerja Pariwisata	Juta orang	22,89 (2022)	25,75	29,00
3	Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel Dan Tourism Development Index, Terbit Biennial Tahun Genap)	Peringkat (xx besar)	22	22	20
4	Kunjungan Wisatawan Masncanegara	juta kunjungan	11,57 (2023)	14,6-16,10	20,0-23,5
5	Perjalanan Wisatawan Nusantara	juta kunjungan	852,80 (2023)	1.084	1.500

Sumber : Matriks Kinerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

3) Telaah Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengampu urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif dimana melaksanakan Prioritas Nasional 3 yaitu "Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi". Matriks Kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Matriks Kinerja
Pencapaian Indikator Program Prioritas
Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
1	Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif	%	5,30 (2022)	5,3-5,5	6,1
2	Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif	%	-11,07 (2023)	4,9-5,2	6,0
3	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Juta orang	24,92 (2023)	25,5	27,66
4	Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif	%	31,94 (2023)	5,3-7,3	7,0-8,0

Sumber : Matriks Kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

d. Telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Semarang perlu menyelaraskan kebijakan dengan kinerja dari Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan, nilai capaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang agregrat dari nilai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk menyelaraskan kebijakan terkait kebudayaan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah untuk menyelaraskan kebijakan terkait pariwisata serta mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk menyelaraskan kebijakan terkait kebudayaan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah untuk menyelaraskan kebijakan terkait pariwisata adalah sebagai berikut :

1) Telaah Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, Provinsi Jawa Tengah menjadikan budaya sebagai prioritas. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Rencana Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Tujuan: Meningkatkan pemajuan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	NA	62,31	62,86	63,40	63,95	64,69	65,04
Sasaran: Meningkatnya partisipasi budaya	Angka melek budaya	52,61	53,82	55,32	56,82	58,32	59,82	61,32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

2) Telaah Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengembangan sektor pariwisata. Seperti yang kita ketahui, terdapat destinasi Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi prioritas nasional yaitu Candi Borobudur. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rencana Strategis
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Tujuan: Meningatkan pengembangan sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	3,56	3,60	3,73	3,95	4,18	4,90	4,60
Sasaran: Meningkatnya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	NA	12,61	12,50	12,38	12,27	12,16	12,04

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Perturan Daerah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 untuk kawasan perkotaan Semarang dijabarkan pada Tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.13
Integrasi Program RTRW yang Sesuai dengan Urusan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode				Indikasi Program RTRW	Program Nomenklatur
II	B			Kawasan Budidaya	
II	B	8		Kawasan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Pada kawasan budidaya yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu kawasan wisata yang meliputi sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan wisata bahari/pantai di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, dan Kecamatan Tugu.
2. Pengembangan dan peningkatan kawasan wisata Kebun Binatang di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan.
3. Pengembangan dan peningkatan wisata pertanian (agrowisata) di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Mijen.
4. Pengembangan dan peningkatan wisata religi (Kawasan Gereja Blenduk, Kuil Sam Po Kong, Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, dan Kawasan Vihara Watugong) di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Banyumanik.

Untuk pengembangan kawasan strategis, selain yang sudah tercantum dalam RTRW, ke depan juga akan didorong pengembangan kawasan strategis lainnya, diantaranya adalah :

- Pengembangan kawasan Semarang Lama
- Pengembangan Kawasan Kampung Bahari
- Pengembangan Kawasan Perbatasan Kota
- Pengembangan Kawasan Pariwisata

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Semarang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 isu yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah “Masih Kurangnya Kontribusi Sektor Terhadap Kesejahteraan” dengan isu strategis yaitu “Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Daerah”.

Tabel 2.14
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Masih Kurangnya Kontribusi Sektor Terhadap Kesejahteraan	Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Daerah

Sumber : Laporan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain :

1) Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender;
3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah;
4) Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim;
5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan
7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang fokus pada poin ke 3 (tiga) yaitu belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Semarang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak sebagai berikut :

1. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (belum tercapai)
2. Jumlah wisatawan mancanegara (tercapai)
3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (tercapai)
4. Jumlah devisa sektor pariwisata (tercapai)

Adapun masalah sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yaitu masih kurangnya kontribusi sektor ekonomi terhadap kesejahteraan sedangkan isu strategisnya yaitu belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah.

Tabel 2.15
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	3,66	3,83	3,99	4,16	4,33	4,50	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata melalui peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata 2. Meningkatkan tata kelola sistem pariwisata

Sumber : Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029

Strategi untuk mendukung indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik pariwisata melalui peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata.
    - Pengembangan destinasi pariwisata
    - Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata dan perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata dan kapasitas pelaku pariwisata
    - Peningkatan dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan
    - Pengembangan promosi serta informasi pariwisata melalui media cetak maupun elektronik
    - Perluasan wilayah promosi destinasi wisata
2. Meningkatkan tata kelola sistem pariwisata
    - Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan
    - Fasilitasi dan pemberian insentif bagi industri pariwisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan menyerap tenaga kerja
    - Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata

Program yang mendukung yaitu sebagai berikut :

1.a Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
    a. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
    b. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
    c. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
    d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
    e. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

1.b Program Pemasaran Pariwisata
- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
    b. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

g. Telaahan Dokumen Lainnya

Telaah dokumen lainnya yang digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Induk Kepariwisataan

   Rencana Induk Kepariwisataan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015-2025. Di dalam Bab 3 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang adalah Semarang Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, Mampu Mendorong Pembangunan, dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dari visi tersebut dirumuskan misi pembangunan kepariwisataan Semarang yaitu :

   1. Mengembangkan dan meningkatkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan;
   2. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis dan bertanggung jawab;
   3. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
   4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang sinergis, antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat

   Ripparkot ini bertujuan sebagai dasar hukum pengambil kebijakan terkait pengembangan pariwisata di Kota Semarang. Gambaran lingkup substansi Ripparkot ini dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut :

Gambar 2.4
Gambaran Lingkup Substansi RIPPARKOT Semarang

2. Kota Layak Anak

   Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Sistem Perlindungan Khusus Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan orang tua,

keluarga, masyarakat, swasta dan Forum Anak. Dengan demikian pembentukan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan landasan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pemenuhan indikator ketersedian fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak, melalui fasilitasi ajang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif anak, ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang dapat diakses semua anak.

Ajang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif anak dilaksanakan dalam kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi kegiatan budaya yang melibatkan anak.
b. Fasilitasi upaya pelestarian permainan tradisional.
c. Fasilitasi sarana olahraga, kesenian dan pengembangan minat bakat.
d. Fasilitasi lomba olahraga, kesenian dan permainan tradisional secara berkala baik antar sekolah maupun antar kecamatan dan kelurahan.
e. Dibangunnya pusat-pusat kegiatan anak.

Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari berbagai pihak, guna menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pemenuhan hak anak di bidang kebudayaan dan pariwisata antara lain sebagai berikut :

a. Penyediaan sarana dan prasarana permainan anak di daya tarik wisata yang di kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu di UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata dan UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele.
b. Penyediaan sarana dan prasarana seni budaya antara lain di pertunjukan dan latihan seni budaya di Taman Budaya Raden Saleh dan gedung Oudetrap.
c. Penyediaan sarana dan prasarana edukasi berlalu lintas antara lain di taman lalu lintas.
d. Penyelenggaran event seni budaya dengan melibatkan pelajar antara lain lomba tari dan lomba dalang.
e. Kerjasama dengan sekolah dan komunitas seni budaya yang anggotanya anak-anak untuk mengikuti *workshop* seni tradisional.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaaan Gender. Peraturan Daerah ini sebagai landasan dan acuan untuk percepatan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender. Pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah, mewujudkan perencanaan responsif Gender atas melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki, mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender, meningkatkan

kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan, meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender di semua bidang pembangunan.
Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG, antara lain anggotanya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dengan tugas antara lain sebagai berikut :

a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah.
b. Menyusun program kerja pokja PUG setiap tahun.
c. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender.
d. Menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun.

Pokja PUG mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu Gender yang berkembang di lingkungannya.
b. Wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Penetapan *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program. Tugas *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

a. Mempromosikan PUG pada unit kerja.
b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender.
c. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
d. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam peraturan ini ada definisi dari beberapa istilah yaitu sebagai berikut :

1) Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan.
2) Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3) Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4) Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang

timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

5) Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
6) *Gender Analysis Pathway* adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
7) *Gender Budget Statement* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
8) *Focal Point Responsif* Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung aspek sebagai berikut :

a. Kesetaraan akses dan partisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan pariwisata dengan menyediakan kesempatan yang setara bagi pelaku seni budaya dan pariwisata baik laki-laki dan perempuan dalam menyelenggarakan kegiatan event seni budaya, perlombaan pemilihan Denok Kenang Kota Semarang, pelatihan dan *workshop* terkait seni budaya dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Hal ini akan mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan tata kelola kelembagaan pada komunitas/kelompok/sanggar seni budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif.
b. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pariwisata akan mendukung pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain ibu-ibu yang mengelola homestay, kuliner dan *guide*.
c. Penyediaan sarana dan prasarana yang sensitif gender antara lain sebagai berikut :
    1) Penyediaan ruang laktasi di daya tarik wisata yang di kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu di UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata dan UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele serta tempat budaya yaitu di Taman Budaya Raden Saleh.
    2) Penyediaan toilet terpisah laki-laki dan perempuan di daya tarik wisata yang di kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu di UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata dan UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele serta tempat budaya yaitu di Taman Budaya Raden Saleh.
    3) Penyediaan akses jalan untuk disabilitas di daya tarik wisata yang di kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu di UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata dan UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele serta tempat budaya yaitu di Taman Budaya Raden Saleh.

3. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran Responsif Gender (ARG) yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaaan Gender. Peraturan Daerah ini sebagai landasan dan acuan untuk percepatan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Peraturan Wali Kota Semarang Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Tujuan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender yaitu sebagai berikut :

a. Sebagai instrumen pemerintah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagaimana telah disepakati secara internasional.
b. Untuk mengetahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh pemerintah berpengaruh terhadap Kesetaraan Gender.
c. Kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan Gender (laki-laki maupun perempuan).
d. Memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran.

Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender dinyatakan melalui Gender *Budget Statement*. Gender *Budget Statement* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengarusutamaan gender (PUG) melalui kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang memperhatikan kebutuhan dan peran laki-laki dan perempuan di urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Dukungan tersebut terkait dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memastikan pada penyusunan perencanaan anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dianalisa perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan disusunnya *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Anggaran Responsif Gender (ARG).

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung yaitu sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

b. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Pengembangan Kebudayaan
   Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
      Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
      Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

4. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

Peraturan Daerah ini menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kota Semarang.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan "Semarang Hebat". Dalam peraturan ini ada definisi dari beberapa istilah yaitu sebagai berikut :

a. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan dan mengembangkan kualitas hidup yang bermartabat.
b. Penanggulangan kebijakan kemiskinan adalah arah dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terencana yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan.
c. Program penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kebudayaan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama pada pelaku seni budaya, pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Adapun bentuk dukungannya antara lain yaitu sebagai berikut :

a. Pengembangan desa wisata, mendorong terbentuknya desa wisata dan kelompok sadar wisata di daya tarik wisata dengan melibatkan pemandu wisata, pengelola homestay dan kuliner di daya tarik wisata.
b. Pelatihan tata kelola kelembagaan kelompok sadar wisata.
c. Pemberdayaan pelaku seni budaya antara lain melalui pelatihan gambang Semarang.
d. Memfasilitasi kelompok/sanggar seni budaya untuk tampil di event yang diselenggarakan di area publik dan daya tarik wisata.
e. Menyelenggarakan festival lokal yang melibatkan antara lain komunitas film, komunitas keroncong dan komunitas musik rock serta komunitas gambang Semarang.

5. Indeks Harmoni Indonesia

Berdasarkan identifikasi data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung Eksplorasi Literasi Budaya Generasi Muda perlu diperkuat dengan memberikan ruang bagi dinamika dan kreativitas mereka dalam memahami, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal. Pemerintah Daerah dapat mendorong program edukasi budaya di sekolah, festival seni dan budaya, serta pelibatan komunitas kreatif dalam berbagai kegiatan budaya. Selain itu, pemanfaatan media digital dan teknologi dapat menjadi strategi efektif untuk menarik minat generasi muda dalam mengeksplorasi identitas budaya mereka secara lebih interaktif dan relevan dengan perkembangan zaman. Adapun peningkatan harmoni sosial dan budaya melalui program sebagai berikut :

a. Program toleransi dan dialog meliputi mengadakan forum lintas agama dan budaya untuk memperkuat pemahaman antarumat.
b. Pelestarian Budaya meliputi dukungan melalui festival budaya lokal dan melibatkan generasi muda dalam kegiatan seni tradisional.

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah metrik komposit yang mengukur tingkat keselarasan dan keseimbangan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan di masyarakat Indonesia, dengan tujuan memetakan dan mengevaluasi kondisi harmoni sosial serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih baik. IHaI mengintegrasikan berbagai indikator seperti kesenjangan pendapatan, akses pendidikan, pluralisme budaya dan toleransi antar umat beragama, serta disosialisasikan dan diukur oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memotivasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung peningkataan Indeks Harmoni Indonesia melalui pelestarian seni budaya, penguatan nilai toleransi dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif yang inklusif dan berbasis kebersamaan antar masyarakat. Adapun event yang mendukung antara lain sebagai berikut :

a. Semarang Night Carnival.
b. Dugderan.
c. Karnaval kirab merah putih.
d. Edukasi nilai toleransi melalui seni budaya pada event wayang kulit, wayang *on the street* dan film.
e. Kolaborasi antar warga di daya tarik wisata menyambut wisatawan yang berkunjung berekreasi.

6. Kota Sehat

Kota Sehat tertuang pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Dalam peraturan ini ada definisi dari beberapa istilah yaitu sebagai berikut :

1) Kabupaten/Kota Sehat adalan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
2) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
3) Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.

Untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih masyarakat dibutuhkan indikator. Indikator tersebut merupakan alat bagi semua pihak yang ikut terlibat dapat menilai sendiri kemajuan yang sudah dilakukan dan menjadi tolok ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung indikator Kota Sehat yaitu sebagai berikut :

1) Kawasan Pariwisata Sehat meliputi :

a. Informasi Wisata & Kesehatan dengan indikator adanya informasi objek dan adanya informasi tentang kesehatan.
b. Sarana Pariwisata dengan indikator sertifikat layak hotel meningkat dan sertifikat layak restoran meningkat, tidak mencemari lingkungan dan terjaminnya kebersihan lingkungan.
c. Objek & Daya Tarik wisata dengan indikator peningkatan jumlah wisatawan.
d. Pelayanan Kesehatan dengan indikator terselenggaranya asuransi kesehatan bagi wisatawan, kesehatan petugas penjamah makanan di restoran memenuhi syarat, tidak terjadi keracunan makanan dan penurunan kasus kecelakaan objek wisata.
e. Sarana Penunjang dengan indikator adanya sarana telekomunikasi, tersedianya sarana dasar (air bersih, jalan, limbah dan sampah), tersedianya sarana transportasi wisatawan yang memadai dan tersedianya sarana tanggap darurat.
f. Kemasyarakatan dengan indikator penurunan kasus gangguan keamanan (kerusuhan, anak jalanan, asongan, kriminal, dll), peningkatan pendapatan masyarakat dan terselenggaranya pendidikan/latihan/kursus bagi masyarakat pemandu pariwisata/pramu wisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung kota sehat antara lain yaitu sebagai berikut :

a. Pengembangan daya tarik wisata yang sehat dan ramah lingkungan dengan memperhatikan kebersihan, bebas sampah, memiliki ruang terbuka hijau, tersedia tempat cuci tangan, toiletnya bersih dan tempat sampah terpilah.
b. Penyelenggaraan event seni budaya dengan memperhatikan kesehatan masyarakat antara lain sanitasi, pengaturan lalu lintas dan kerumunan penonton secara tertib.
c. Peningkatan aktivitas fisik melalui budaya dan wisata mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang menyehatkan antara lain *city tour* dengan berjalan kaki atau bersepeda, pertunjukkan seni budaya yang melibatkan gerak tubuh dan berkegiatan di Taman Budaya Raden Saleh di ruang terbuka.
d. Pendidikan budaya hidup sehat larangan merokok di daya tarik wisata.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahrga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 (Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

1. Adaptasi budaya dengan tetap mempertahankan identitas masyarakat

   Isu "Adaptasi budaya dengan tetap mempertahankan identitas masyarakat" di Kota Semarang merupakan tantangan penting dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Kota Semarang, yang kaya akan keberagaman budaya karena warisan sejarahnya sebagai pusat perdagangan dan pertemuan berbagai etnis, menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi, urbanisasi, serta arus budaya luar yang masuk. Adaptasi budaya ini terlihat dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari gaya hidup masyarakat hingga tata kelola ruang kota. Meskipun demikian, penting bagi masyarakat Semarang untuk tidak kehilangan jati diri budayanya, yang terdiri dari tradisi Jawa, Tionghoa, Arab dan Belanda, yang sudah mengakar selama berabad-abad. Pemerintah Kota Semarang dan berbagai komunitas lokal berusaha untuk tetap mempertahankan identitas budaya ini melalui berbagai upaya, seperti pelestarian situs-situs bersejarah, festival budaya, dan promosi seni tradisional.

2. Minat generasi muda terhadap seni tradisional

   Di tengah arus modernisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, seni tradisional sering kali menghadapi tantangan sehingga bagaimana menjaga relevansinya di mata generasi muda. Banyak generasi muda lebih tertarik pada hiburan modern misalnya musik pop, konten digital dan budaya global sehingga seni tradisional dianggap “kuno” dan kurang menarik namun kondisi ini tidak sepenuhnya suram. Beberapa komunitas dan kelompok seni tradisional justru mampu menghadirkan kreativitas dan inovasi untuk menjembatani kesenjangan generasi. Selain itu, komunitas kesenian dan sanggar/seni budaya di Kota Semarang juga gencar melakukan revitalisasi seni budaya tradisional dengan cara menyelenggarakan pelatihan dan *workshop*, apresiasi pertunjukan dari komunitas kesenian dan sanggar/seni budaya, yang mengedukasi generasi muda mengenai nilai-nilai filosofi tradisional. Tidak hanya mempertahankan bentuk lama, komunitas seni tradisional di Semarang juga melakukan adaptasi yang kreatif. Misalnya, tari tradisional masih mendapat perhatian generasi muda lebih-lebih saat dibawakan dengan cara presentasi yang lebih modern atau kolektif sehingga terasa lebih relevan dan menarik. Selain itu, gambang Semarang juga memperoleh dukungan dari para pemuda di Kota Semarang, yang turut mengambil peran dalam mempertahankan kesenian tersebut di tengah perubahan sosial budaya.

3. Pengembangan Pariwisata yang Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Semarang merupakan upaya untuk memajukan sektor pariwisata dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan. Inklusivitas dalam pariwisata di Semarang berarti mendorong partisipasi masyarakat lokal, termasuk kelompok rentan seperti difabel dan perempuan, agar mereka mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari industri pariwisata. Selain itu, pengembangan ini juga berfokus pada pelestarian budaya lokal dan memperkaya pengalaman wisatawan melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang inklusif melalui pariwisata yang memperhatikan pada pemberdayaan masyarakat dan pemerataan infrastruktur. Hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam menciptakan kesempatan ekonomi dan sosial yang merata. Dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat, meciptakan kesempatan ekonomi lokal yang lebih luas serta memperkuat inklusi sosial dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam konteks keberlanjutan, Kota Semarang berupaya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur pariwisata dengan perlindungan lingkungan alam. Pembangunan pariwisata terintegrasi berarti adanya konektivitas yang baik antar destinasi wisata, aksesibilitas yang lebih mudah, dan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat lokal. Upaya ini dapat dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan, sehingga potensi pariwisata dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

Perubahan paradigma pariwisata, saat ini hanya memperhatikan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan sektor pariwisata, namun berubah menuju pengalaman wisatawan yang berkualitas dan memastikan dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan dan tentunya berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian, sosial dan lingkungan. Hal ini mencerminkan pemahaman yang semakin mendalam bahwa pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya memperhatikan manfaat ekonomi dan kelestarian budaya.

4. Promosi Pariwisata yang Belum Terintegrasi dan Berkelanjutan

Kota Semarang memiliki kekayaan destinasi pariwisata yang beragam, dari warisan budaya misalnya Kota Lama dan Sam Poo Kong, wisata alam misalnya Goa Kreo dan Waduk Jatibarang, hingga kuliner khas seperti lumpia dan tahu gimbal. Namun, promosi pariwisata di Kota Semarang belum mencerminkan potensi ini secara optimal. Hal ini dikarenakan promosi belum dilakukan secara terintegrasi dan optimal. Promosi secara digital menjadi promosi yang paling banyak dipilih oleh Perangkat Daerah untuk memasarkan pariwisatanya. Komunikasi digital belum berjalan menyeluruh. Banyak destinasi pariwisata tidak tampak aktif di media sosial dan platform digital, sehingga kurang menarik minat wisatawan secara maksimal. Perlu adanya aplikasi yang seharusnya menyatukan informasi destinasi, kuliner, dan agenda event dari semua stakeholder dan instansi yang ada di Kota Semarang. Promosi yang ada umumnya fokus pada tiap destinasi secara individual dan masif hanya saat event tertentu. Branding kota sebagai destinasi terpadu khas MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions*) juga masih belum optimal. Banyak fasilitas wisata seperti hotel, kuliner, hingga event belum terintegrasi dengan baik dalam strategi promosi kota secara keseluruhan. Selain itu,

masih minimnya kolaborasi stakeholder dan kepedulian pada keberlanjutan model pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Semarang seharusnya mengadopsi model Pentahelix (Pemerintah, Swasta, Komunitas, Akademisi, Media), termasuk pengawasan oleh lembaga atau instansi yang berwewenang. Namun, implementasinya masih terbatas *stakeholder* lokal belum muncul dalam sinergi aktif di sisi promosi maupun pengelolaan bersama.

Promosi pariwisata juga belum optimal dalam memperhatikan prinsip keberlanjutan, seperti limitasi pengunjung untuk melindungi ekosistem, edukasi lingkungan budaya atau pendayagunaan ekonomi lokal. Wisata masih berisiko menjadi komodifikasi budaya dan merusak lingkungan dengan belumnya diterapkan pendekatan berkelanjutan.

5. Pengembangan tata kelola dan kompetensi ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal

   Isu "Pengembangan tata kelola dan kompetensi ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal" di Kota Semarang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, sambil menghormati dan memanfaatkan kearifan lokal yang telah ada melalui sektor ekonomi kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat daya saing kota. Semarang, sebagai kota dengan potensi budaya dan seni yang kaya, berupaya memanfaatkan kekayaan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan kreatif seperti seni rupa, musik, desain dan kuliner. Upaya ini melibatkan pelatihan dan pendampingan untuk para pelaku ekonomi kreatif, agar mereka dapat mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan, dan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung, seperti pusat kreatif, ruang pamer, dan *platform online*, juga menjadi bagian dari strategi ini. Dengan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, Kota Semarang berharap dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, menarik investasi, serta meningkatkan daya tarik kota sebagai destinasi kreatif. Kontribusi dari sektor ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya memperkaya kehidupan budaya kota, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas terhadap pelestarian budaya dan perekonomian lokal. Integrasi ekonomi kreatif dalam perencanaan pembangunan kota memungkinkan Semarang untuk bersaing dengan kota-kota lain serta memperkuat posisi sebagai pusat inovasi dan kreativitas di Indonesia.

Tabel 2.16
Isu Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target				Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	Daerah	
1	2	3	4	5	6		7
• Kota Semarang Sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Convention, And Exhibition*) • Kota Semarang Memiliki Kawasan Permukiman Bersejarah Yang Lengkap dan Unik, Seperti Kauman, Kampung Melayu, Pecinan, dan Kawasan Kota Lama	Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal	Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Daerah	Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia	1. Adaptasi Budaya Dengan Tetap Mempertahankan Identitas Masyarakat 2. Minat Generasi Muda Terhadap Seni Tradisional 3. Pengembangan Pariwisata Yang Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan 4. Promosi Pariwisata Yang Belum Terintegrasi dan Berkelanjutan 5. Pengembangan Tata Kelola dan Kompetensi Ekonomi Kreatif Sebagai Upaya Pengembangan Kapasitas Pelaku dan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

Keterangan:

1	Potensi kelebihan dari daerah
2	Permasalahan perangkat daerah yang terdapat di tabel 2.7
3	Isu KLHS yang terdapat di tabel 2.8
4	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang bersifat global yang relevan dengan urusan
5	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang level nasional yang relevan dengan urusan
6	Isu yang terdapat dokumen RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Provinsi/Kab/Kota yang relevan dengan urusan
7	Hasil analisis isu strategis urusan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa visi dan misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Wali Kota Semarang yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Rencana Strategis periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 kemudian Rencana Strategis menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

3.3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun perumusan tujuan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya

Perekonomian Kota Yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing", indikator "Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)". Tujuan ini diimplementasikan dengan meningkatkan potensi sumber daya lokal yang berdaya saing global berlandaskan riset dan inovasi potensi sumber daya lokal yang melimpah. Produk-produk unggulan, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif, didorong untuk masuk ke pasar global melalui promosi internasional dan pengembangan jaringan perdagangan. Hal ini dapat menjadikan Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang maju.

Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif". Pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator "Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif".

Adapun definisi operasional dari indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan serta retribusi jasa usaha dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.

Untuk menghitung Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan formulasi perhitungannya yaitu jumlah realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD TBRS, UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Museum Kota Lama, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibagi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang dikali 100%. Adapun target per tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2025 sebesar 13,56%
2. Tahun 2026 sebesar 14,91%
3. Tahun 2027 sebesar 14,30%
4. Tahun 2028 sebesar 13,80%
5. Tahun 2029 sebesar 13,32%
6. Tahun 2030 sebesar 12,90%

Jumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD TBRS, UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Museum Kota Lama, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok setiap tahunnya target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sudah bertambah atau mengalami kenaikan namun pertumbuhan kenaikannya tidak sama sehingga persentase target per tahun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami penurunan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Tahun 2025
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 535.509.640.000,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 3.948.738.648.038,-
   Persentase target sebesar 13,56%
2. Tahun 2026
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 564.400.200.000,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 3.785.335.467.444,-
   Persentase target sebesar 14,91%
3. Tahun 2027
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 577.841.648.000,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 4.041.961.764.502,-
   Persentase target sebesar 14,30%
4. Tahun 2028
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 591.703.479.610,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 4.286.905.869.897,-
   Persentase target sebesar 13,80%
5. Tahun 2029
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 605.859.133.283,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 4.547.053.738.357,-
   Persentase target sebesar 13,32%
6. Tahun 2030
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 620.763.574.615,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 4.810.843.834.113,-
   Persentase target sebesar 12,90%

3.3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus atau aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Perumusan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Adapun perumusan sasaran Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, agar dapat memperjelas

dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah", melalui indikator "Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perdagangan dan Jasa".

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan kebudayaan dan pengembangan pariwisata yang inklusif, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menetapkan sasaran strategis sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025–2029. Sasaran ini disusun untuk menjembatani antara tujuan strategis dengan indikator kinerja yang terukur dan serta sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, sasarannya yaitu "Meningkatnya Peran Budaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat".

   Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu :

   a. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan

      Adapun definisi operasionalnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, retribusi jasa usaha dari UPTD Taman Budaya Raden Saleh dan Museum Kota Lama dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang. Sedangkan formulasi perhitungannya yaitu jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, retribusi jasa usaha dari UPTD Taman Budaya Raden Saleh dan Museum Kota Lama dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang dikali 100%. Adapun target per tahunnya sebagai berikut :

      1. Tahun 2025 sebesar 1,05%
      2. Tahun 2026 sebesar 1,17%
      3. Tahun 2027 sebesar 1,17%
      4. Tahun 2028 sebesar 1,18%
      5. Tahun 2029 sebesar 1,18%
      6. Tahun 2030 sebesar 1,20%

   b. Nilai Kemajuan Kebudayaan

      Adapun definisi operasionalnya yaitu Nilai Kemajuan Kebudayaan merupakan nilai yang menunjukkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memajukan kebudayaan daerah, sebagaimana diturunkan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.

      Nilai Kemajuan Kebudayaan (Angka) turunan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai yang menunjukan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memajukan kebudayaan daerah. Turunan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) level provinsi. Tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu

daerah. Untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan, mengambil 7 dari 31 komposit IPK yaitu :

1. Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian (persen)
   Sumber data Dinas Pendidikan Kota Semarang
2. Benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan (persen)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
3. Warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (persen)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
4. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni (persen)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
5. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (persen)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
6. Penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni (persen)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
7. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat (persen)
   Sumber data Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Dihitung melalui :

1. Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (kelompok)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
2. Jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang tercatat (kelompok)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
3. Jumlah pengunjung pada lokasi dan atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahahuan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan di Kota Semarang (orang)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
4. Target jumlah pengunjung tempat bersejarah pada tahun berjalan (orang)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
5. Jumlah Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan (CB)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

6. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (WBTB)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
7. Jumlah Cagar Budaya (CB) yang tercatat (CB)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
8. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tercatat (WBTB)
   Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
9. Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kab/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan :
   (1) Guru yg mengajar mulok bahasa daerah
   (2) Guru yg mengajar seni budaya dan
   (3) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul)(sekolah)

   Sumber data Dinas Pendidikan Kota Semarang
10. Jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kab/kota (PAUD, SD dan SMP) di Kota Semarang (sekolah)
    Sumber data Dinas Pendidikan Kota Semarang
11. Jumlah total pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan dalam setahun baik *on site* maupun *online* (orang)
    Sumber data Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
12. Jumlah penduduk kab/kota pada tahun yang sama (orang)
    Sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Sedangkan formulasi perhitungannya yaitu sebagai berikut :

Komposit 1. Kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir dengan bobot 39,47%
Rumus : Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir dibagi jumlah total keseluruhan kesenian yang tercatat dikalikan 100%.

Komposit 2. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan dengan bobot 10,53%
Rumus : Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan, yaitu :
1) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah

2) Guru yang mengajar seni budaya dan
3) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul)

dibagi jumlah seluruh satuan pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) dikalikan 100%.

Komposit 3. Jumlah pengunjung tempat bersejarah dengan bobot 13,16%

Rumus : Jumlah pengunjung pada lokasi dan atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan dan lainnya. Realisasi jumlah pengunjung tempat bersejarah dibagi target jumlah pengunjung tempat bersejarah dikalikan 100%.

Komposit 4. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan dengan bobot 26,32%

Rumus : Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan dibagi jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tercatat dikalikan 100%.

Komposit 5. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dengan bobot 10,52%

Rumus : Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik *on site* maupun *online* dibagi jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun yang sama dikalikan 100%.

Adapun target per tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2025 sebesar 72,07
2. Tahun 2026 sebesar 72,64
3. Tahun 2027 sebesar 73,33
4. Tahun 2028 sebesar 73,95
5. Tahun 2029 sebesar 74,56
6. Tahun 2030 sebesar 75,13

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, sasarannya yaitu “Meningkatnya Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat”. Indikator yang digunakan untuk mencapai yaitu persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun definisi operasionalnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang. Sedangkan

formulasi perhitunganya yaitu jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang dikali 100%. Adapun target per tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2025 sebesar 12,52%
2. Tahun 2026 sebesar 13,74%
3. Tahun 2027 sebesar 13,13%
4. Tahun 2028 sebesar 12,62%
5. Tahun 2029 sebesar 12,14%
6. Tahun 2030 sebesar 11,70%

Jumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok setiap tahunnya target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sudah bertambah atau mengalami kenaikan namun pertumbuhan kenaikannya tidak sama sehingga persentase target per tahun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami penurunan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Tahun 2025
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 494.204.750.000,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 3.948.738.648.038,-
   Persentase target sebesar 12,52%
2. Tahun 2026
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 520.228.250.000,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 3.785.335.467.444,-
   Persentase target sebesar 13,74%
3. Tahun 2027
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 530.632.675.000,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 4.041.961.764.502,-
   Persentase target sebesar 13,13%
4. Tahun 2028
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 541.221.548.000,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 4.286.905.869.897,-
   Persentase target sebesar 12,62%

5. Tahun 2029
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 552.019.177.960,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 4.547.053.738.357,-
   Persentase target sebesar 12,14%
6. Tahun 2030
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 563.030.766.419,-
   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 4.810.843.834.113,-
   Persentase target sebesar 11,70%

Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor yang memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang secara bertahap telah mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, memperkuat penyelenggaraan event kebudayaan dan pariwisata serta membina dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sub sektor antara lain film, musik dan seni pertunjukan.

Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan transaksi ekonomi di sektor perhotelan, restoran, jasa transportasi, event dan daya tarik wisata. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut memberikan sumbangan nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata, khususnya dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan.

Meningkatnya peran kedua sektor ini ditandai pula dengan tumbuhnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang inovatif, inklusif dan berdaya saing tinggi. Melalui integrasi kebijakan yang mendorong promosi digital, pelatihan SDM dan peningkatan kualitas destinasi serta produk kreatif, Kota Semarang secara bertahap memperkuat posisinya sebagai kota budaya dan kota kreatif yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

3. “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”, pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu :
   1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
      Adapun definisi operasionalnya yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
      Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan formulasi perhitunganya yaitu sebagai berikut :

Penilaian dari Inspektorat Kota Semarang dengan komponen

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja

Adapun target per tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2025 sebesar 80,20
2. Tahun 2026 sebesar 80,30
3. Tahun 2027 sebesar 80,40
4. Tahun 2028 sebesar 80,50
5. Tahun 2029 sebesar 80,60
6. Tahun 2030 sebesar 80,70

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Sedangkan formulasi perhitunganya yaitu sebagai berikut :

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan aplikasi ASIKMAS yang dibagikan kepada pengunjung. Kuisioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisioner yaitu :

1. Pelayanan UPTD untuk pengunjung
2. Prosedur pelayanan di UPTD
3. Waktu pelayanan
4. Harga Tiket
5. Standar pelayanan
6. Pelayanan dari petugas
7. Perilaku petugas
8. Kualitas sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan dari pengunjung

Adapun target per tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2025 sebesar 89,50
2. Tahun 2026 sebesar 90,15
3. Tahun 2027 sebesar 91,80
4. Tahun 2028 sebesar 92,50
5. Tahun 2029 sebesar 93,00
6. Tahun 2030 sebesar 93,50

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	16,25	13,56	14,91	14,30	13,80	13,32	12,90	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan serta retribusi jasa usaha dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.
		Meningkatnya Peran Budaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan	%	1,17	1,05	1,17	1,17	1,18	1,18	1,20	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa

NSPK dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Keterangan
												Kesenian dan Hiburan, retribusi jasa usaha dari UPTD Taman Budaya Raden Saleh dan Museum Kota Lama dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.
			2. Nilai Kemajuan Kebudayaan	Angka	78,12	72,07	72,64	73,33	73,95	74,56	75,13	Nilai Kemajuan Kebudayaan merupakan nilai yang menunjukkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memajukan kebudayaan daerah, sebagaimana diturunkan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.
		Meningkatnya Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	15,07	12,52	13,74	13,13	12,62	12,14	11,70	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang

NSPK dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Keterangan
												dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Angka	80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	80,60	80,70	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang

NSPK dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Keterangan
												ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Angka	86,05	89,50	90,15	91,80	92,50	93	93,50	Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Keterangan:

19	Sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat didukung oleh PD terkait
20	Tujuan PD minimal 1 kalimat tujuan
21	Sasaran Perangkat Daerah
22	Indikator tujuan maupun sasaran
23	Satuan dari indikator
24	Target indikator
25	Target indikator
26	Target indikator
27	Target indikator
28	Target indikator
29	Target indikator
30	Dapat diisi definisi operasional atau rumus indikator

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    - Definisi Operasional :
      Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan serta retribusi jasa usaha dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.
    - Formulasi Perhitungan :
      Jumlah realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD TBRS, UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Museum Kota Lama, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibagi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang dikali 100%.
2. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan
    - Definisi Operasional :
      Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, retribusi jasa usaha dari UPTD Taman Budaya Raden Saleh dan Museum Kota Lama dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.
    - Formulasi Perhitungan :
      Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, retribusi jasa usaha dari UPTD Taman Budaya Raden Saleh dan Museum Kota Lama dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang dikali 100%.
3. Nilai Kemajuan Kebudayaan
    - Definisi Operasional :
      Nilai Kemajuan Kebudayaan adalah nilai yang menunjukkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memajukan kebudayaan daerah, sebagaimana diturunkan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.
    - Formulasi Perhitungan :
      (Kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir x 39,47%) + (% satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan x 10,53%) + (Jumlah pengunjung tempat bersejarah x 13,16%) + (% Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan x 26,32%) + (Tingkat pemanfaatan perpustakaan + 10,52%).

4. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    - Definisi Operasional :
      Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, Wisma Semarang di Cibubur, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang.
    - Formulasi Perhitungan :
      Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman lele, Wisma Semarang di Cibubur, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang dikali 100%.
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
    - Definisi Operasional :
      Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
      Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
    - Formulasi Perhitungan :
      Penilaian dari Inspektorat Kota Semarang dengan komponen
      1. Perencanaan Kinerja
      2. Pengukuran Kinerja
      3. Pelaporan Kinerja
      4. Evaluasi Internal
      5. Capaian Kinerja
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
    - Definisi Operasional :
      Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
    - Formulasi Perhitungan :
      Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan aplikasi ASIKMAS yang dibagikan kepada pengunjung. Kuisioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisioner yaitu :

1. Pelayanan UPTD untuk pengunjung
2. Prosedur pelayanan di UPTD
3. Waktu pelayanan
4. Harga Tiket
5. Standar pelayanan
6. Pelayanan dari petugas
7. Perilaku petugas
8. Kualitas sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan dari pengunjung

3.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, maka dirumuskan pula strategi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung strategi "Penguatan Kualitas Produktivitas Masyarakat Sektor Unggulan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Dengan Menerapkan Prinsip Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Digital dan Ekonomi Syariah".

Adapun pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indikator Tujuan : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sasaran 1 : Meningkatnya Peran Budaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Indikator Sasaran : 1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan 2. Nilai Kemajuan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pentingnya Menjaga Warisan Budaya 2. Meningkatkan Sumber Daya Pelestarian Kesenian 3. Meningkatkan Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya
	Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Indikator Sasaran : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Meningkatkan Aktivitas Promosi Budaya dan Pariwisata Kota Semarang 3. Meningkatkan Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indikator Sasaran : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 3.3
Tahapan Strategi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pentingnya Menjaga Warisan Budaya	Peningkatan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pentingnya Menjaga Warisan Budaya	Penguatan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pentingnya Menjaga Warisan Budaya	Percepatan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pentingnya Menjaga Warisan Budaya	Perwujudan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pentingnya Menjaga Warisan Budaya
Pengembangan Sumber Daya Pelestarian Kesenian	Peningkatan Sumber Daya Pelestarian Kesenian	Penguatan Sumber Daya Pelestarian Kesenian	Percepatan Sumber Daya Pelestarian Kesenian	Perwujudan Sumber Daya Pelestarian Kesenian
Pengembangan Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya	Peningkatan Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya	Penguatan Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya	Percepatan Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya	Perwujudan Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Destinasi Pariwisata	Penguatan Destinasi Pariwisata	Percepatan Destinasi Pariwisata	Perwujudan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Aktivitas Promosi Budaya dan Pariwisata Kota Semarang	Peningkatan Aktivitas Promosi Budaya dan Pariwisata Kota Semarang	Penguatan Aktivitas Promosi Budaya dan Pariwisata Kota Semarang	Percepatan Aktivitas Promosi Budaya dan Pariwisata Kota Semarang	Perwujudan Aktivitas Promosi Budaya dan Pariwisata Kota Semarang
Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	Peningkatan Potensi Ekonomi Kreatif	Penguatan Potensi Ekonomi Kreatif	Percepatan Potensi Ekonomi Kreatif	Perwujudan Potensi Ekonomi Kreatif
Pengembangan Fungsi Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Peningkatan Fungsi Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penguatan Fungsi Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Percepatan Fungsi Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Perwujudan Fungsi Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

3.2.2. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan Kebudayaan Lokal dan Peningkatan Komunitas Budaya.
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital, Termasuk Talenta Digital Muda.
3. Penataan Kawasan Ekonomi Strategis dan Destinasi Wisata Berbasis Kearifan Lokal.

Arah kebijakan pembangunan Rencana Strategis Dinas Kebudayan den Pariwisata Kota Semarang Tahun 2925-2029 merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Semarang.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yg relevan	Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Arah Kebijakan Rencana Strategis	Keterangan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Ekonomi Daerah	Pengembangan Kebudayaan Lokal dan Peningkatan Komunitas Budaya Catatan : masuk pada MISI 1 : Mewujudkan	1. Peningkatan upaya Pelibatan Komunitas atau Masyarakat Dalam Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yg relevan	Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Arah Kebijakan Rencana Strategis	Keterangan
		Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian	2. Penguatan Pola Pikir Masyarakat Terhadap Budaya Tradisional 3. Pembinaaan Budaya Tradisonal Melalui Pemanfaatan Ruang Publik Seperti Taman Budaya dan Museum Untuk Kegiatan Edukatif dan Promosi Budaya 4. Meningkatkan Regenerasi Tenaga Pelestari Seni Budaya Karena Minat Generasi Muda Rendah Pada Pelestarian Seni Budaya 5. Meningkatkan Ruang Kreatif Pertunjukan Seni Budaya 6. Meningkatnya Pembinaan Kelompok/Sanggar Seni 7. Meningkatnya Inventarisasi Cagar Budaya Benda 8. Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Benda 9. Meningkatnya Inventarisasi Cagar Budaya Tak Benda 10. Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Tak Benda	
		Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital, Termasuk Talenta Digital Muda Catatan : masuk pada MISI 4 : Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.	1. Meningkatkan Pengemasan Potensi Daya Tarik Objek Wisata Secara Kreatif dan Inovatif 2. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata Untuk Mendaftarkan Usahanya Secara Resmi 3. Meningkatnya Kerjasama Budaya dan Pariwisata Dengan Kabupaten/Kota Lainnya 4. Peningkatan Keterlibatan Stakeholder (Media, Komunitas, Pelaku Usaha dan Akademisi) Dalam Upaya Promosi Budaya dan Pariwisata Kota Semarang 5. Meningkatnya Penggunaan Media Digital dan Teknologi	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yg relevan	Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Arah Kebijakan Rencana Strategis	Keterangan
			Interaktif Dalam Promosi Daya Tarik Wisata dan Kuliner 6. Meningkatnya Pemasaran Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata 7. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif Terutama Dalam Tata Kelola Kepariwisataan 8. Peningkatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkaitan Dengan Pengetahuan dan Teknologi Tradisional 9. Peningkatan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	
		Penataan Kawasan Ekonomi Strategis Dan Destinasi Wisata Berbasis Kearifan Lokal Catatan : masuk pada MISI 4 : Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.	1. Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Wisata (Parkir, Kebersihan, Petunjuk Arah, Transportasi Ramah Wisatawan)	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dari hasil analisis tersebut dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik dan operasional.

Sasaran 1
Meningkatnya Peran Budaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat
Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu peningkatan upaya pelibatan komunitas atau masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya, penguatan pola pikir masyarakat terhadap budaya tradisional dan pembinaaan budaya tradisonal melalui pemanfaatan ruang publik seperti taman budaya dan museum untuk kegiatan edukatif dan promosi budaya.

Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kebudayaan.

Strategi 2 Meningkatkan Sumber Daya Pelestarian Kesenian

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatkan regenerasi tenaga pelestari seni budaya karena minat generasi muda rendah pada pelestarian seni budaya, meningkatkan ruang kreatif pertunjukan seni budaya dan meningkatnya pembinaan kelompok/sanggar seni.

Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

Strategi 3 Meningkatkan Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatnya inventarisasi cagar budaya benda dan tak benda dan meningkatnya penetapan cagar budaya benda dan tak benda.

Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Sasaran 2
Meningkatnya Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat
Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 4 Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatkan pengemasan potensi daya tarik objek wisata secara kreatif dan inovatif, meningkatkan infrastruktur penunjang wisata (parkir, kebersihan, petunjuk arah dan transportasi ramah wisatawan) dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya secara resmi.

Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Strategi 5 Meningkatkan Aktivitas Promosi Budaya dan Pariwisata Kota Semarang

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatnya kerjasama budaya dan pariwisata dengan Kabupaten/Kota lainnya, peningkatan keterlibatan

stakeholder (media, komunitas, pelaku usaha dan akademisi) dalam upaya promosi budaya dan pariwisata Kota Semarang, meningkatnya penggunaan media digital dan teknologi interaktif dalam promosi daya tarik wisata dan kuliner dan meningkatnya pemasaran desa wisata dan daya tarik wisata.
Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemasaran Pariwisata.

Strategi 6 Meningkatkan Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif terutama dalam tata kelola kepariwisataan, peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional dan peningkatan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi 7 Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

a. Meningkatnya pelaporan kinerja perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
b. Meningkatnya pelaporan keuangan dan aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
c. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasaran serta kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran *(output)* dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya Peran Budaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat			Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan (%)		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Nilai Kemajuan Kebudayaan (Angka)		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayan (%)	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Kepala Bidang Kebudayaan
				Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Masyarakat Lokal Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal (%)	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Atraksi Budaya
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Staf Subkoordinator Atraksi Budaya
				Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Komunitas Seni Budaya (%)	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Atraksi Budaya
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Staf Subkoordinator Atraksi Budaya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)		
				Meningkatnya Pembinaan Lembaga Adat Yang Ada di Kota Semarang	Persentase Apresiasi Lembaga Adat yang dibina (%)	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Museum dan Konservasi Budaya
				Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Staf Subkoordinator Museum dan Konservasi Budaya
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional		Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kepala Bidang Kesenian
				Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar /Kelompok Seni Budaya yang ada di Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya (%)	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pembinaan Kesenian
				Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Staf Subkoordinator Pembinaan Kesenian
				Meningkatnya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya	Persentase Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Potensi Seni
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Staf Subkoordinator Potensi Seni
				Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal (%)	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pagelaran Kesenian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Staf Subkoordinator Pagelaran Kesenian
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan (%)	2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kepala Bidang Kebudayaan
					Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan (%)		
					Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan (%)		
					Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)		
				Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Semarang	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya
				Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Staf Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya
		Meningkatnya Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat			Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kepala Bidang Industri Pariwisata
				Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata (%)	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Subkoordinator Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Staf Subkoordinator Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Semarang	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%)	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Subkoordinator Destinasi Pariwisata

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Staf Subkoordinator Destinasi Pariwisata
				Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Staf Subkoordinator Destinasi Pariwisata
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Staf Subkoordinator Destinasi Pariwisata
				Meningkatnya Pariwisata Berkualitas	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (%)	3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan
				Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Staf Subkoordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	Kepala Bidang Pemasaran
				Meningkatnya Kerjasama Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri , Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Kerjasama Pariwisata yang terealisasi (%)	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Subkoordinator Kerjasama Budaya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Staf Subkoordinator Kerjasama Budaya
				Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan (%)	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Subkoordinator Promosi Budaya dan Pariwisata
				Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Staf Subkoordinator Promosi Budaya dan Pariwisata
				Meningkatnya Pemasaran Promosi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Efektivitas Media Promosi (%)	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Subkoordinator Informasi Budaya dan Pariwisata
				Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Staf Subkoordinator Informasi Budaya dan Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Tervalidasi (%)	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kepala Bidang Kelembagaan
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Profesional (%)	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Subkoordinator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
				Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Staf Subkoordinator Pemberdayaan Sumber Daya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)		Manusia Kepariwisataan
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif (%)	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Subkoordinator Pengawasan Kepariwisataan
				Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Staf Subkoordinator Pengawasan Kepariwisataan
				Meningkatnya Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Subkoordinator Kerjasama Organisasi Kepariwisataan
				Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Staf Subkoordinator Kerjasama Organisasi Kepariwisataan
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Angka)		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Angka)		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Terwujudnya Pelayanan Internal Yang Berkualitas Dalam Mendukung Kinerja Dinas		Persentase Perencanaan Serta Pelaporan Kinerja an Keuangan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Yang Berkualitas (%)	2.22.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Dinas
					Persentase Kinerja Pelayanan Umum Dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (%)	2.22.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Dinas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Kebudayaan Dan Pariwisata	Tersedianya Acuan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Beserta Pelaporan Kinerja Yang Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Perencanaan Serta Pelaporan Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Yang Sesuai Peraturan Perundangan (%)	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terselenggaranya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Terwujudnya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yang Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yang Sesuai Peraturan Perundangan (%)	2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terwujudnya Layanan Kepegawaian Yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai layanan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Nilai)	2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.22.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.22.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras Kantor Untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (%)	2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Untuk Mendukung Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang dan Persentase Aduan Masyarakat Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk Mendukung Penyediaan Sarpras Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sesuai Ketentuan (%)	2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Dari Tabel 4.1 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program. Distribusi kinerja tiap jabatan yaitu kinerja strategis daerah sebagai ukuran kinerja Kepala Daerah, kinerja strategis bidang urusan sebagai ukuran kinerja Kepala Perangkat Daerah, kinerja taktikal (*intermediate outcome*) sebagai sasaran program sebagai kinerja eselon III, kinerja taktikal (*immediate outcome*) dan operasional (*output* aktivitas) sebagai kinerja eselon IV atau jabatan fungsional. Pertanggungjawaban pelaksanaan teknis program yaitu eselon III, pertanggungjawaban pelaksanaan teknis kegiatan yaitu Kasubbagian/Subkoordinator/eselon IV dan pertanggungjawaban pelaksanaan teknis sub kegiatan yaitu staf.

Program Pembangunan Daerah Kota Semarang tak lepas dari arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan untuk didukung oleh Kota Semarang melalui program prioritas dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang maupun program kegiatan Perangkat Daerah terkait.

Tabel 4.2
Program Dukungan Terhadap Program
Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan
Kepada Kota Semarang

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah Ke Kabupaten/Kota	Program Dukungan Terhadap Program Delegasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung
1.	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Pengembangan desa wisata ekologi terintegrasi (10 Kandri baru) seperti pelestarian hutan, sungai, danau dan pantai	I. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
2.	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru. QW: (Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang (Tekstil dan Pengolahan Ikan). PUS: Pengembangan	a. Penguatan produksi pangan lokal (pertanian, perikanan, dan peternakan) b. Penguatan petani milenial c. Penguatan lumbung pangan dan urban farming d. Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal	II. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya III. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah Ke Kabupaten/Kota	Program Dukungan Terhadap Program Delegasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung
	Metropolitan Semarang sebagai *Global City* • Pengembangan *Cultural Heritage Tourism* (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api dsk) • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, tanaman perkebunan, susu, kedelai dan perikanan tangkap) Catatan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang masuk pada program delegasi Pengembangan *Cultural Heritage Tourism* (Kota Lama Semarang)	e. Pengembangan Kawasan strategis sejarah dan budaya f. Pemeliharaan Kawasan Kota Lama serta Insentif Perizinan PBG dan Keringanan PBB untuk bangunan cagar budaya di Situs Kota Lama (Untuk Kota Lama Semarang) g. Pengembangan Kawasan Semarang Lama Catatan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada poin e, f dan g	Pariwisata Kabupaten/ Kota a. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	a. Penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim b. Fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi produk UMKM dan IKM secara masif serta pendampingan bagi Juru Sembelih Halal (Juleha) c. Program halal corner di pasar-pasar tradisional yang direvitalisasi d. Peningkatan literasi dan inklusi terkait pembiayaan syariah dan juga akan menerapkan skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalkan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) produktif sebagai sumber pendanaan non APBD, yang sejalan dengan upaya menyediakan akses kredit bagi masyarakat Catatan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada poin a	IV. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota a. Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota a. Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota b. Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah Ke Kabupaten/Kota	Program Dukungan Terhadap Program Delegasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung
			Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
4.	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Penyediaan *support system* dan kompetisi bagi konten kreator dan innovator	V. Program Pemasaran Pariwisata 1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berkomitmen untuk mendukung implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam rangka pengembangan ekonomi yang menjadi salah satu program prioritas dari Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan kepada Pemerintah Kota Semarang. Hal ini sejalan dengan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam meningkatkan peran pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak perekonomian masyarakat Kota Semarang. Berikut beberapa dukungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam mewujudkan pariwisata ramah muslim yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan destinasi wisata ramah muslim, melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti ketersediaan tempat ibadah, kuliner halal dan sarana layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim.
2. Peningkatan kualitas promosi pariwisata dengan menonjolkan keunggulan Kota Semarang sebagai destinasi ramah muslim, baik melalui media digital, event pariwisata, maupun jejaring kerja sama antar daerah.
3. Kolaborasi dengan pelaku industri kreatif dan budaya, agar nilai-nilai kearifan lokal dapat terintegrasi dalam pengembangan produk dan layanan wisata ramah muslim.
4. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata, baik aparatur maupun pelaku usaha, agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai standar dan memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang bentuk dukungan tertera dalam Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penciptaan Ruang-Ruang Publik Yang Diperuntukkan Bagi Aktivitas Budaya Dengan Pengelolaan Yang Berpihak Pada Seniman	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Sumber (kolom 2) Program Prioritas berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 Tabel 3.5 Program Prioritas pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029
2	Peningkatan Kesejahteraan Seniman Kota Semarang Melalui Bantuan Ekonomi dan Penyelenggaran Kegiatan Apresiasi Seni	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Sumber (kolom 2) Program Prioritas berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 Tabel 3.5 Program Prioritas pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029
3	Menyelenggarakan Event Nasional dan Internasional Dengan Melibatkan Potensi Lokal Baik Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Yang Ada Untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan Lokal, Nusantara dan Mancanegara	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota 1. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 1. Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Sumber (kolom 2) Program Prioritas berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 Tabel 3.5 Program Prioritas pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
4	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekologi Seperti Pelestarian Hutan, Sungai, Danau dan Pantai	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota 1. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 1. Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Sumber (kolom 2) Program Prioritas berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 Tabel 3.5 Program Prioritas pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

1. Uraian Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang diperoleh dengan teknik *cascading* kinerja. Dalam menentukan indikator dan *outcome* program berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Pada tujuan dan sasaran urusan pemerintahan bidang kebudayaan didukung oleh 3 (tiga) program yaitu :

a. Program Pengembangan Kebudayaan
   Sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan

Outcome : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
Indikator program : tingkat partipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
Satuan : %

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
Outcome : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
Indikator program : persentase kesenian tradisonal yang dilestarikan dan dikembangkan
Satuan : %

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Sasaran : meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan
Outcome : meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan
Indikator Program :
1). Persentase warisan budaya benda yang dilestarikan
2.) Persentase warisan budaya benda yang ditetapkan
3). Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan
4). Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan
Satuan : %

Pada tujuan dan sasaran urusan pemerintahan bidang pariwisata didukung oleh 3 (tiga) program yaitu :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Sasaran : meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
Outcome : meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
Indikator Program : persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan
Satuan : %

b. Program Pemasaran Pariwisata
Sasaran : meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
Outcome : meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
Indikator Program : persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
Satuan : %

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran : meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
Outcome : meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator Program : persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi
Satuan : %

Sedangkan untuk mendukung administrasi perkantoran Perangkat Daerah didukung 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan indikator persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas dan persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai instrumen untuk mewujudkan program yang diperoleh dengan teknik *cascading* kinerja. Pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan
   Sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
   Outcome : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
   Indikator program : tingkat partipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
   Satuan : %
   Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :
   1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Sasaran : meningkatnya pengelolaan kebudayaan masyarakat lokal Kota Semarang
      Indikator : persentase event yang mengapresiasi budaya lokal
      Satuan : %
   2) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Sasaran : meningkatnya pelestarian kesenian tradisional masyarakat Kota Semarang
      Indikator : persentase apresiasi kegiatan komunitas seni budaya
      Satuan : %
   3) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Sasaran : meningkatnya pembinaan lembaga adat yang ada di Kota Semarang
      Indikator : persentase apresiasi lembaga adat yang dibina
      Satuan : %

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   Sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
   Outcome : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
   Indikator program : persentase kesenian tradisonal yang dilestarikan dan dikembangkan
   Satuan : %
   Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :
   1) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Sasaran : meningkatnya apresiasi kegiatan pembinaan terhadap sanggar/kelompok seni budaya yang ada di Kota Semarang
      Indikator : persentase apresiasi pembinaan terhadap kelompok/sanggar seni budaya
      Satuan : %
   2) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Sasaran : meningkatnya apresiasi kelompok/sanggar seni budaya

Indikator : persentase apresiasi kelompok/sanggar seni budaya
Satuan : %

3) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal
Indikator : persentase apresiasi terhadap kesenian lokal
Satuan : %

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Sasaran : meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan
Outcome : meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan
Indikator Program :
1). Persentase warisan budaya benda yang dilestarikan
2.) Persentase warisan budaya benda yang ditetapkan
3). Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan
4). Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan
Satuan : %
Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pengelolaan cagar budaya di Kota Semarang
Indikator : persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
Satuan : %

Pada urusan pemerintahan bidang pariwisata didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Sasaran : meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
Outcome : meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
Indikator Program : persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan
Satuan : %
Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Semarang
Indikator : persentase pengelolaan kawasan daya tarik wisata
Satuan : %

2) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata Kota Semarang
Indikator : persentase tata kelola destinasi pariwisata
Satuan : %

3) Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pariwisata berkualitas
Indikator : persentase usaha pariwisata yang berkualitas
Satuan : %

b. Program Pemasaran Pariwisata
Sasaran : meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
Outcome : meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
Indikator Program : persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
Satuan : %

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

   Sasaran pada kegiatan ini ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

   i. Meningkatnya kerjasama pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri , daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
      Indikator : persentase kerjasama pariwisata yang terealisasi
      Satuan : %
   ii. Meningkatnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
      Indikator : persentase daya tarik wisata yang dipasarkan
      Satuan : %
   iii. Meningkatnya Pemasaran Promosi Pariwisata kabupaten/kota
      Indikator : persentase efektivitas media promosi
      Satuan : %

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran : meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

Outcome : meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

Indikator Program : persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi

Satuan : %

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
   Sasaran : meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
   Indikator : persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang profesional
   Satuan : %
2. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
   Sasaran : meningkatnya pembinaan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif
   Indikator : persentase pembinaan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif
   Satuan : %
3. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
   Sasaran : meningkatnya kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif
   Indikator : jumlah kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif
   Satuan : dokumen

Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Sasaran : terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   Outcome : terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   Indikator Program :
   1. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas
   2. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

   Satuan : %
   Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu sebagai berikut :
   1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sasaran : tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan
      Indikator : persentase perencanaan serta pelaporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan
      Satuan : %
   2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Sasaran : terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan
      Indikator : persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan
      Satuan : %
   3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      Sasaran : terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
      Indikator : nilai layanan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
      Satuan : Nilai
   4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Sasaran : terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
      Indikator : persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
      Satuan : %
   5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      Sasaran : terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
      Indikator : persentase pemenuhan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
      Satuan : %

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran : terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Indikator : persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selesai ditindaklanjuti
Satuan : %
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran : terpeliharanya barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Indikator : persentase pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan
Satuan : %

3. Uraian Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai instrumen untuk mewujudkan program dan kegiatan yang diperoleh dengan teknik *cascading* kinerja. Dalam menentukan indikator dan sasaran sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan terdapat 6 (enam) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan
Sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
Outcome : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
Indikator program : tingkat partipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
Satuan : %
Pada program ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pengelolaan kebudayaan masyarakat lokal Kota Semarang
Indikator : persentase event yang mengapresiasi budaya lokal
Satuan : %
a. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Sasaran : terlaksananya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
Indikator : jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan
Satuan : objek

2) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pelestarian kesenian tradisional masyarakat Kota Semarang
Indikator : persentase apresiasi kegiatan komunitas seni budaya
Satuan : %
a. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Sasaran : terlaksananya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya
Indikator : jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan
Satuan : objek

3) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pembinaan lembaga adat yang ada di Kota Semarang
Indikator : persentase apresiasi lembaga adat yang dibina
Satuan : %
a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
Sasaran : terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat
Indikator : jumlah sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat yang dibina
Satuan : orang

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
Outcome : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
Indikator program : persentase kesenian tradisonal yang dilestarikan dan dikembangkan
Satuan : %
Pada program ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya apresiasi kegiatan pembinaan terhadap sanggar/kelompok seni budaya yang ada di Kota Semarang
Indikator : persentase apresiasi pembinaan terhadap sanggar/kelompok seni budaya
Satuan : %
a. Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
Sasaran : tersedianya standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
Indikator : jumlah sumber daya manusia kesenian tradisonal yang mengikuti proses standarisasi
Satuan : sertifikat

2) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya apresiasi kelompok/sanggar seni budaya
Indikator : persentase apresiasi kelompok/sanggar seni budaya
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Sasaran : terlaksananya peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional
Indikator : jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya
Satuan : lembaga

3) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal
Indikator : persentase apresiasi terhadap kesenian lokal
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Sasaran : terlaksananya peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional
Indikator : jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya
Satuan : Lembaga

Pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan dan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

Namun demikian kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota harus ada 3 (tiga) sasaran/output kegiatan, sehingga pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sasaran kegiatan atau 3 (tiga) output kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Sasaran : meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan
Outcome : meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan
Indikator Program :
1). Persentase warisan budaya benda yang dilestarikan
2). Persentase warisan budaya benda yang ditetapkan
3). Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan
4). Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan
Satuan : %
Pada program ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pengelolaan cagar budaya di Kota Semarang
Indikator : persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
Sasaran : terlaksananya cagar budaya yang dilindungi
Indikator : jumlah objek cagar budaya yang dilindungi
Satuan : objek

Pada urusan pemerintahan bidang pariwisata didukung oleh 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Sasaran : meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
Outcome : meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
Indikator Program : persentase peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan
Satuan : %
Pada program ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Semarang
Indikator : persentase pengelolaan kawasan daya tarik wisata
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran : tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasaran adalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
Indikator : jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
Satuan : unit

2) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata Kota Semarang
Indikator : persentase tata kelola destinasi pariwisata
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran : terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)
Indikator : jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)
Satuan : lokasi

b. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran : tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
Indikator : jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara
Satuan : unit

c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran : terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
Indikator : jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
Satuan : laporan

3) Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya pariwisata berkualitas
Indikator : persentase usaha pariwisata yang berkualitas
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran : meningkatnya investasi pariwisata kabupaten/kota
Indikator : jumlah laporan pengelolaan investasi pariwisata kabupaten/kota
Satuan : laporan

b. Program Pemasaran Pariwisata
Sasaran : meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
Outcome : meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
Indikator Program : persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
Satuan : %
Pada program ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran pada kegiatan ini ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

i. Meningkatnya kerjasama pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri , daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
Indikator : persentase kerjasama pariwisata yang terealisasi
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Sasaran : meningkatnya kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
Indikator : jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
Satuan : dokumen

ii. Meningkatnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri , daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
Indikator : persentase daya tarik wisata yang dipasarkan
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Sasaran : terlaksananya fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri
Indikator : jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri
Satuan : kegiatan

iii. Meningkatnya Pemasaran Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator : persentase efektivitas media promosi
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Sasaran : terlaksananya penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
Indikator : jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
Satuan : promosi

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran : meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
Outcome : meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator Program : persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi
Satuan : %
Pada program ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sasaran : meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
Indikator : persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang professional
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Sasaran : terfasilitasinya pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
Indikator : jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
Satuan : orang

2. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sasaran : meningkatnya pembinaan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif
Indikator : persentase pembinaan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Sasaran : terfasilitasinya pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
Indikator : jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
Satuan : orang

3. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sasaran : meningkatnya kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator : jumlah kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif
Satuan : dokumen

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Sasaran : terfasilitasinya pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
Indikator : jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
Satuan : orang

Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran : terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Outcome : terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Indikator Program :
1. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas
2. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Satuan : %

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran : tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan
Indikator : persentase perencanaan serta pelaporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran : tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah
Indikator : jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Satuan : dokumen

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran : tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
Indikator : jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
Satuan : dokumen

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sasaran : tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Indikator : jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Satuan : dokumen

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
Sasaran : tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
Indikator : jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
Satuan : dokumen

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Sasaran : tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
Indikator : jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
Satuan : dokumen

f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran : terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah
Indikator : jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
Satuan : laporan

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Sasaran : terlaksananya walidata pendukung statistik sektoral daerah
Indikator : jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah
Satuan : dokumen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran : terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan
Indikator : persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sasaran : tersedianya gaji dan tunjangan ASN
Indikator : jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Satuan : orang/bulan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sasaran : tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN
Indikator : jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
Satuan : dokumen
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sasaran : tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Indikator : jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Satuan : laporan
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sasaran : tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD
Indikator : jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
Satuan : laporan
e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sasaran : tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Indikator : jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Satuan : dokumen

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran : terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Indikator : nilai layanan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Satuan : Nilai
a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sasaran : terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
Indikator : jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
Satuan : dokumen
b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Indikator : jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
Satuan : orang
c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran : terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Indikator : jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Satuan : orang

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran : terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Indikator : persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Satuan : %
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      Sasaran : tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
      Indikator : jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan
      Satuan : paket
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      Sasaran : tersedianya peralatan rumah tangga
      Indikator : jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
      Satuan : paket
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      Sasaran : tersedianya penyediaan bahan logistik kantor
      Indikator : jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
      Satuan : paket
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Sasaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan
      Indikator : jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
      Satuan : paket
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
      Sasaran : terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu
      Indikator : jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
      Satuan : laporan
   f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      Sasaran : terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
      Indikator : jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
      Satuan : laporan
   g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
      Sasaran : terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
      Indikator : jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
      Satuan : dokumen

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Sasaran : terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   Indikator : persentase pemenuhan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   Satuan : %
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      Sasaran : tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
      Indikator : jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan
      Satuan : unit
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      Sasaran : tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan
      Indikator : jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
      Satuan : unit
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Sasaran : tersedianya peralatan dan mesin lainnya
      Indikator : jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
      Satuan : unit
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Sasaran : terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   Indikator : persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selesai ditindaklanjuti
   Satuan : %
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      Sasaran : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
      Indikator : jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
      Satuan : laporan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Sasaran : tersedianya jasa pelayanan umum kantor
      Indikator : jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
      Satuan : laporan
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Sasaran : terpeliharanya barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator : persentase pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan
Satuan : %

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   Sasaran : tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   Indikator : jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
   Satuan : unit
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   Sasaran : tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   Indikator : jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
   Satuan : unit
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   Sasaran : terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
   Indikator : jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
   Satuan : unit
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   Sasaran : terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
   Indikator : jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
   Satuan : unit

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu sebagai berikut :

1. UPTD Taman Budaya Raden Saleh (TBRS)
2. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
3. UPTD Tinjomoyo
4. UPTD Kreo dan Agrowisata

Adapun indikator pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Sasaran kegiatan dan indikator kegiatan pada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Raden Salah (TBRS) dan Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Raden Salah (TBRS) mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Outcome : Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Indikator *outcome* : Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
Satuan : %

a. Untuk Kepala UPTD TBRS, mengampu
   Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   Output : Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD TBRS
   Indikator *output* : Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD TBRS
   Satuan : %
b. Untuk Kepala TU UPTD TBRS, mengampu
   Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   Output : Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   Indikator *output* : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
   Satuan : Unit

2) Sasaran kegiatan dan indikator kegiatan pada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kampoeng Wisata Taman Lele dan Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampoeng Wisata Taman Lele mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu sebagai berikut :
   Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Outcome : Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Indikator *outcome* : Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
   Satuan : %

   a. Untuk Kepala UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, mengampu
      Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      Output : Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
      Indikator *output* : Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
      Satuan : %
   b. Untuk Kepala TU UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, mengampu
      Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      Output : Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator *output* : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
Satuan : Unit

3) Sasaran kegiatan dan indikator kegiatan pada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Tinjomoyo dan Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tinjomoyo mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu sebagai berikut :
Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Outcome : Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Indikator *outcome* : Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
Satuan : %
   a. Untuk Kepala UPTD Tinjomoyo, mengampu
      Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      Output : Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD Tinjomoyo
      Indikator *output* : Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD Tinjomoyo
      Satuan : %
   b. Untuk Kepala TU UPTD Tinjomoyo, mengampu
      Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      Output : Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      Indikator output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
      Satuan : Unit

4) Sasaran kegiatan dan indikator kegiatan pada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kreo dan Agrowisata dan Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kreo dan Agrowisata mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu sebagai berikut :
Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Outcome : Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Indikator *outcome* : Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
Satuan : %
   a. Untuk Kepala UPTD Kreo dan Agrowisata, mengampu
      Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      Output : Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD Kreo dan Agrowisata

Indikator *output* : Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD Kreo dan Agrowisata
Satuan : %

b. Untuk Kepala TU UPTD Kreo dan Agrowisata, mengampu
Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Output : Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator *output* : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
Satuan : Unit

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				25.592.524.187		28.426.647.722		29.660.190.204		29.886.774.431		30.421.239.694	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				16.779.092.205		18.680.793.196		19.508.501.985		19.660.540.328		20.019.167.293	Sekretaris Dinas
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas (%)	100%	100%	16.779.092.205	100%	18.680.793.196	100%	19.508.501.985	100%	19.660.540.328	100%	20.019.167.293	Sekretaris Dinas
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	94,25%	94,98%		95,33%		95,90%		96,73%		97,56%		Sekretaris Dinas
2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.791.500		31.791.500		31.791.500		60.979.907		60.979.907	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan (%)	100%	100%	31.791.500	100%	31.791.500	100%	31.791.500	100%	60.979.907	100%	60.979.907	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen				287.000		287.000		287.000		29.475.407		29.475.407	Staf Subkoordinator

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perencanaan Perangkat Daerah													Perencanaan dan Evaluasi
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 dokumen	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	2 dokumen	29.475.407	3 dokumen	29.475.407	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				287.000		287.000		287.000		287.000		287.000	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				215.000		215.000		215.000		215.000		215.000	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	215.000	2 dokumen	215.000	2 dokumen	215.000	2 dokumen	215.000	2 dokumen	215.000	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				287.000		287.000		287.000		287.000		287.000	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	2 dokumen	287.000	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2.22.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				215.000		215.000		215.000		215.000		215.000	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2 dokumen	2 dokumen	215.000	2 dokumen	215.000	2 dokumen	215.000	2 dokumen	215.000	2 dokumen	215.000	Staf Subbagian Keuangan dan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)												Barang Milik Daerah
2.22.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.500		500.500		500.500		500.500		500.500	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3 laporan	2 laporan	500.500	2 laporan	500.500	2 laporan	500.500	2 laporan	500.500	2 laporan	500.500	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
2.22.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	Staf Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.342.405.075		12.943.960.504		13.579.941.013		14.237.142.464		14.927.141.684	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan (%)	100%	100%	12.342.405.075	100%	12.943.960.504	100%	13.579.941.013	100%	14.237.142.464	100%	14.927.141.684	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.046.456.175		12.642.671.384		13.268.636.277		13.925.837.728		14.615.836.948	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	59 orang/bulan	PNS : 58 orang P3K : 10 orang	12.046.456.175	PNS : 55 orang P3K : 10 orang	12.642.671.384	PNS : 53 orang P3K : 10 orang	13.268.636.277	PNS : 51 orang P3K : 10 orang	13.925.837.728	PNS : 50 orang P3K : 10 orang	14.615.836.948	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2.22.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				295.196.500		300.536.720		310.552.336		310.552.336		310.552.336	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	295.196.500	12 dokumen	300.536.720	12 dokumen	310.552.336	12 dokumen	310.552.336	12 dokumen	310.552.336	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				250.800		250.800		250.800		250.800		250.800	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2 laporan	2 laporan	250.800	2 laporan	250.800	2 laporan	250.800	2 laporan	250.800	2 laporan	250.800	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				250.800		250.800		250.800		250.800		250.800	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 laporan	2 laporan	250.800	2 laporan	250.800	2 laporan	250.800	2 laporan	250.800	2 laporan	250.800	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2.22.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				250.800		250.800		250.800		250.800		250.800	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	250.800	2 dokumen	250.800	2 dokumen	250.800	2 dokumen	250.800	2 dokumen	250.800	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				29.020.000		32.000.000		35.000.000		36.000.000		36.600.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai layanan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Nilai)	a = 85 b = 80,49 Total = (a + b)/2 = (85 + 80,49)/2 = 82,74	a = 87 b = 82,86 Total = (a + b)/2 = (87 + 82,86) / 2 = 84,93	29.020.000	a = 88 b = 84 Total = (a + b)/2 = (88 + 84) / 2 =86	32.000.000	a = 89 b = 86,40 Total = (a + b)/2 = (89 + 86,40) /2 = 87,70%	35.000.000	a = 90 b = 94 Total = (a + b)/2 = (90 + 94) /2 x = 92	36.000.000	a = 91 b = 96,40 Total = (a + b)/2 = (91 + 96,40) /2 = 93,70	36.600.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0 dokumen	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		6.500.000		7.500.000		8.000.000		8.300.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	546 orang	68 orang	5.000.000	65 orang	6.500.000	63 orang	7.500.000	61 orang	8.000.000	60 orang	8.300.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				19.020.000		20.500.000		22.500.000		23.000.000		23.300.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	74 orang	68 orang	19.020.000	65 orang	20.500.000	63 orang	22.500.000	61 orang	23.000.000	60 orang	23.300.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				732.209.787		829.555.956		837.749.328		808.815.921		751.815.921	Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	100%	100%	732.209.787	100%	829.555.956	100%	837.749.328	100%	808.815.921	100%	751.815.921	Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata													
2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				120.154.500		157.173.000		159.000.000		159.000.000		129.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13 paket	14 paket	120.154.500	15 paket	157.173.000	16 paket	159.000.000	17 paket	159.000.000	18 paket	129.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.470.000		60.970.000		60.970.000		60.970.000		50.970.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	13 paket	6 paket	50.470.000	6 paket	60.970.000	6 paket	60.970.000	6 paket	60.970.000	6 paket	50.970.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.810.900		49.840.900		50.500.000		50.500.000		50.500.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	47 paket	6 paket	40.810.900	6 paket	49.840.900	6 paket	50.500.000	6 paket	50.500.000	6 paket	50.500.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.870.280		55.876.928		57.000.000		57.255.000		50.255.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 paket	14 paket	50.870.280	15 paket	55.876.928	16 paket	57.000.000	17 paket	57.255.000	18 paket	50.255.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				185.181.000		201.671.500		202.985.900		202.985.900		202.985.900	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	140 laporan	115 laporan	185.181.000	120 laporan	201.671.500	125 laporan	202.985.900	125 laporan	202.985.900	125 laporan	202.985.900	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140.432.900		155.856.821		157.978.521		157.978.521		157.978.521	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	77 laporan	62 laporan	140.432.900	64 laporan	155.856.821	66 laporan	157.978.521	66 laporan	157.978.521	66 laporan	157.978.521	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD (Laporan)												
2.22.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				144.290.207		148.166.807		149.314.907		120.126.500		110.126.500	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6 dokumen	8 dokumen	144.290.207	8 dokumen	148.166.807	9 dokumen	149.314.907	9 dokumen	120.126.500	9 dokumen	110.126.500	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				917.450.615		1.471.196.535		1.627.953.182		1.473.155.000		1.323.155.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	a = 80 unit b = 80 unit Total = (80 / 80) x 100% = 100%	a = 90 unit b = 90 unit Total = (90 / 90) x 100% = 100%	917.450.615	a = 95 unit b = 95 unit Total = (95 / 95) x 100% = 100%	1.471.196.535	a = 100 unit b = 100 unit Total = (100 / 100) x 100% = 100%"	1.627.953.182	a = 105 unit b = 105 unit Total = (105 / 105) x 100% = 100%	1.473.155.000	a = 110 unit b = 110 unit Total = (110 / 110) x 100% = 100%	1.323.155.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0 unit	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		850.000.000		1.005.000.000		850.000.000		700.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0 unit	2 unit	300.000.000	5 unit	850.000.000	5 unit	1.005.000.000	5 unit	850.000.000	5 unit	700.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.450.615		21.196.535		22.953.182		23.155.000		23.155.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	94 unit	9 unit	17.450.615	12 unit	21.196.535	12 unit	22.953.182	12 unit	23.155.000	12 unit	23.155.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.904.533.699		2.472.655.152		2.491.992.383		2.292.372.457		2.192.713.702	Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selesai ditindaklanjuti (%)	100%	100%	1.904.533.699	100%	2.472.655.152	100%	2.491.992.383	100%	2.292.372.457	100%	2.192.713.702	Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.000.544.000		1.150.018.928		1.150.018.928		1.100.018.928		1.082.869.654	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	12 laporan	1.000.544.000	12 laporan	1.150.018.928	12 laporan	1.150.018.928	12 laporan	1.100.018.928	12 laporan	1.082.869.654	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				903.989.699		1.322.636.224		1.341.973.455		1.192.353.529		1.109.844.048	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	12 laporan	903.989.699	12 laporan	1.322.636.224	12 laporan	1.341.973.455	12 laporan	1.192.353.529	12 laporan	1.109.844.048	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah				821.681.529		899.633.549		904.074.579		752.074.579		726.761.079	Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan (%)	a = 160 unit b = 160 unit Total = (160 / 160) x 100% = 100%	a = 162 unit b = 162 unit Total = (162 / 162) x 100% = 100%	821.681.529	a = 163 unit b = 163 unit Total = (163 / 163) x 100% = 100%	899.633.549	a = 164 unit b = 164 unit Total = (164 / 164) x 100% = 100%	904.074.579	a = 164 unit b = 164 unit Total = (164 / 164) x 100% = 100%	752.074.579	a = 164 unit b = 164 unit Total = (164 / 164) x 100% = 100%	726.761.079	Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0 unit	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				365.655.458		410.980.524		410.980.524		340.980.524		335.980.524	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24 unit	28 unit	365.655.458	28 unit	410.980.524	28 unit	410.980.524	28 unit	340.980.524	28 unit	335.980.524	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				165.548.271		171.046.225		172.205.255		150.205.255		150.205.255	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3 unit	2 unit	165.548.271	2 unit	171.046.225	2 unit	172.205.255	2 unit	150.205.255	2 unit	150.205.255	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.477.800		277.606.800		280.888.800		220.888.800		200.575.300	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	125 unit	125 unit	250.477.800	125 unit	277.606.800	125 unit	280.888.800	125 unit	220.888.800	125 unit	200.575.300	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				3.324.269.718		3.675.962.910		3.829.036.158		3.857.153.539		3.923.476.616	Kepala Bidang Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayan (%)	57,92%	63,74%	3.324.269.718	66,29%	3.675.962.910	68,83%	3.829.036.158	72,70%	3.857.153.539	76,58%	3.923.476.616	Kepala Bidang Kebudayaan
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.874.960.141		2.071.830.955		2.156.776.024		2.171.873.456		2.208.795.304	Subkoordinator Atraksi Budaya
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Masyarakat Lokal Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal (%)	57,92%	63,74%	1.874.960.141	66,29%	2.071.830.955	68,83%	2.156.776.024	72,70%	2.171.873.456	76,58%	2.208.795.304	Subkoordinator Atraksi Budaya
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.874.960.141		2.071.830.955		2.156.776.024		2.171.873.456		2.208.795.304	Staf Subkoordinator Atraksi Budaya
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	10 objek	10 objek	1.874.960.141	10 objek	2.071.830.955	10 objek	2.156.776.024	10 objek	2.171.873.456	10 objek	2.208.795.304	Staf Subkoordinator Atraksi Budaya

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemajuan Kebudayaan													
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				127.555.312		143.593.493		151.839.596		154.216.602		165.165.988	Sub Subkoordinator Atraksi Budaya
Meningkatnya pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Komunitas Seni Budaya (%)	50%	60%	127.555.312	65%	143.593.493	70%	151.839.596	75%	154.216.602	80%	165.165.988	Subkoordinator Atraksi Budaya
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				127.555.312		143.593.493		151.839.596		154.216.602		165.165.988	Staf Subkoordinator Atraksi Budaya
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	7 objek	10 objek	127.555.312	10 objek	143.593.493	10 objek	151.839.596	10 objek	154.216.602	10 objek	165.165.988	Staf Subkoordinator Atraksi Budaya
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.321.754.265		1.460.538.462		1.520.420.538		1.531.063.481		1.549.515.324	Subkoordinator Museum dan Konservasi Budaya
Meningkatnya pembinaan Lembaga Adat yang ada di Kota Semarang	Persentase Apresiasi Lembaga Adat yang dibina (%)	56%	64%	1.321.754.265	68%	1.460.538.462	72%	1.520.420.538	80%	1.531.063.481	84%	1.549.515.324	Subkoordinator Museum dan Konservasi Budaya
2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				1.321.754.265		1.460.538.462		1.520.420.538		1.531.063.481		1.549.515.324	Staf Subkoordinator Museum dan Konservasi Budaya
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	3.548 orang	2.678 orang	1.321.754.265	2.758 orang	1.460.538.462	2.840 orang	1.520.420.538	2.925 orang	1.531.063.481	3.015 orang	1.549.515.324	Staf Subkoordinator Museum dan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Lembaga, dan Pranata Adat													Konservasi Budaya
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				4.745.940.199		5.248.039.908		5.466.577.073		5.506.719.245		5.601.406.315	Kepala Bidang Kesenian
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	26,88%	29,30%	4.745.940.199	31,03%	5.248.039.908	32,1%	5.466.577.073	33,13%	5.506.719.245	34,12%	5.601.406.315	Kepala Bidang Kesenian
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.745.940.199		5.248.039.908		5.466.577.073		5.506.719.245		5.601.406.315	Sub Koordinator/ Eselon IV Bidang Kesenian
Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar /Kelompok Seni Budaya yang ada di Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya (%)	25,98%	27,47%	2.579.960.149	28,20%	2.874.125.774	28,90%	2.992.958.546	29,60%	3.015.785.389	30,28%	3.068.126.584	Subkoordinator Pembinaan Kesenian
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				2.579.960.149		2.874.125.774		2.992.958.546		3.015.785.389		3.068.126.584	Staf Subkoordinator Pembinaan Kesenian
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	777 sertifikat	625 sertifikat	2.579.960.149	650 sertifikat	2.874.125.774	675 sertifikat	2.992.958.546	700 sertifikat	3.015.785.389	725 sertifikat	3.068.126.584	Staf Subkoordinator Pembinaan Kesenian
Meningkatnya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya	Persentase Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	35%	45%	1.082.990.025	50%	1.186.957.067	55%	1.236.809.264	60%	1.245.466.928	65%	1.266.639.866	Subkoordinator Potensi Seni
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola				1.082.990.025		1.186.957.067		1.236.809.264		1.245.466.928		1.266.639.866	Staf Subkoordinator Potensi Seni

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Lembaga Kesenian Tradisional													
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	234 lembaga	90 lembaga	1.082.990.025	100 lembaga	1.186.957.067	110 lembaga	1.236.809.264	120 lembaga	1.245.466.928	130 lembaga	1.266.639.866	Staf Subkoordinator Potensi Seni
Meningkatnya Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal (%)	61,64%	57,50%	1.082.990.025	60%	1.186.957.067	62,50%	1.236.809.264	65%	1.245.466.928	67,50%	1.266.639.866	Subkoordinator Pagelaran Seni
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				1.082.990.025		1.186.957.067		1.236.809.264		1.245.466.928		1.266.639.866	Staf Subkoordinator Pagelaran Seni
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	234 lembaga	90 lembaga	1.082.990.025	100 lembaga	1.186.957.067	110 lembaga	1.236.809.264	120 lembaga	1.245.466.928	130 lembaga	1.266.639.866	Staf Subkoordinator Pagelaran Seni
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				743.222.065		821.851.708		856.074.988		862.361.319		877.189.470	Kepala Bidang Kebudayaan
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan (%)	75,07%	84,24%	743.222.065	87,39%	821.851.708	90,54%	856.074.988	93,69%	862.361.319	96,84%	877.189.470	Kepala Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan (%)	42,55%	43,12%		43,40%		43,69%		43,98%		44,26%		
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan (%)	85,58%	86,78%		87,38%		87,98%		88,58%		89,18%		
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)	3,30%	4,50%		5,10%		5,70%		6,30%		6,90%		
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				743.222.065		821.851.708		856.074.988		862.361.319		877.189.470	Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya di Kota Semarang	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	75,07%	84,24%	743.222.065	87,39%	821.851.708	90,54%	856.074.988	93,69%	862.361.319	96,84%	877.189.470	Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				743.222.065		821.851.708		856.074.988		862.361.319		877.189.470	Staf Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	465 objek	588 objek	743.222.065	610 objek	821.851.708	632 objek	856.074.988	654 objek	862.361.319	676 objek	877.189.470	Staf Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				16.363.797.060		18.095.015.197		18.848.521.913		18.986.930.390		19.313.407.324	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				11.931.769.582		13.194.098.603		13.743.522.950		13.844.444.395		14.082.497.185	Kepala Bidang Industri Pariwisata
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	13,13%	8,5%	11.931.769.582	8,5%	13.194.098.603	8,5%	13.743.522.950	8,5%	13.844.444.395	8,5%	14.082.497.185	Kepala Bidang Industri Pariwisata
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5.759.871.501		6.358.570.668		6.620.904.842		6.671.965.948		6.788.086.605	Subkoordinator Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata (%)	100%	100%	5.759.871.501	100%	6.358.570.668	100%	6.620.904.842	100%	6.671.965.948	100%	6.788.086.605	Subkoordinator Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5.759.871.501		6.358.570.668		6.620.904.842		6.671.965.948		6.788.086.605	Staf Subkoordinator Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	1 unit	1 unit	5.759.871.501	1 unit	6.358.570.668	1 unit	6.620.904.842	1 unit	6.671.965.948	1 unit	6.788.086.605	Staf Subkoordinator Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				6.081.377.046		6.720.043.839		7.002.283.680		7.051.301.679		7.171.173.807	Subkoordinator Destinasi Pariwisata

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Semarang	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%)	100%	100%	5.161.377.046	100%	5.800.043.839	100%	6.082.283.680	100%	6.131.301.679	100%	6.251.173.807	Subkoordinator Destinasi Pariwisata
Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD TBRS	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD TBRS (%)	100%	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	Kepala UPTD TBRS
Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD Tinjomoyo	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD Tinjomoyo (%)	100%	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	Kepala UPTD Tinjomoyo
Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD Kreo dan Agrowisata	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD Kreo dan Agrowisata (%)	100%	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	Kepala UPTD Goa Kreo dan Agrowisata
Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele (%)	100%	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	Kepala UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				168.230.869		185.440.041		193.226.523		194.581.123		197.889.000	Staf Subkoordinator Destinasi Pariwisata
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	144 lokasi	3 lokasi	168.230.869	4 lokasi	185.440.041	4 lokasi	193.226.523	4 lokasi	194.581.123	4 lokasi	197.889.000	Staf Subkoordinator Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4.911.446.177		5.524.546.298		5.795.217.242		5.842.223.762		5.957.181.565	Staf Subkoordinator Destinasi Pariwisata
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	6 unit	6 unit	4.911.446.177	6 unit	5.524.546.298	6 unit	5.795.217.242	6 unit	5.842.223.762	6 unit	5.957.181.565	Staf Subkoordinator Destinasi Pariwisata

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpelihara (Unit)												
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1 unit	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	Kepala Tata Usaha UPTD TBRS
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1 unit	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	Kepala Tata Usaha UPTD Tinjomoyo
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1 unit	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	Kepala Tata Usaha UPTD Goa Kreo dan Agrowisata
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1 unit	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000	Kepala Tata Usaha UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				81.700.000		90.057.500		93.839.915		94.496.794		96.103.242	Staf Subkoordinator Destinasi Pariwisata
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2 laporan	4 laporan	81.700.000	4 laporan	90.057.500	4 laporan	93.839.915	4 laporan	94.496.794	4 laporan	96.103.242	Staf Subkoordinator Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha				90.521.035		115.484.096		120.334.428		121.176.768		123.236.773	Subkoordinator Usaha Jasa

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota													Pariwisata dan Hiburan
Meningkatnya Pariwisata Berkualitas	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (%)	80%	85%	90.521.035	90%	115.484.096	95%	120.334.428	100%	121.176.768	100%	123.236.773	Subkoordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan
3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				90.521.035		115.484.096		120.334.428		121.176.768		123.236.773	Staff Subkoordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan
Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	14 laporan	14 laporan	90.521.035	14 laporan	115.484.096	14 laporan	120.334.428	14 laporan	121.176.768	14 laporan	123.236.773	Staff Subkoordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				3.528.157.608		3.901.421.247		4.063.882.957		4.093.724.865		4.164.115.745	Kepala Bidang Pemasaran
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata (%)	8,5%	8,5%	3.528.157.608	8,5%	3.901.421.247	8,5%	4.063.882.957	8,5%	4.093.724.865	8,5%	4.164.115.745	Kepala Bidang Pemasaran
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3.528.157.608		3.901.421.247		4.063.882.957		4.093.724.865		4.164.115.745	Sub Koordinator/ Eselon IV Bidang Pemasaran
Meningkatnya Kerjasama Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri , Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Kerjasama Pariwisata yang terealisasi (%)	100%	100%	335.609.814	100%	370.848.844	100%	386.424.495	100%	389.129.966	100%	395.744.666	Subkoordinator Kerjasama Budaya
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				335.609.814		370.848.844		386.424.495		389.129.966		395.744.666	Staf Subkoordinator Kerjasama Budaya

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3 dokumen	4 dokumen	335.609.814	4 dokumen	370.848.844	4 dokumen	386.424.495	4 dokumen	389.129.966	4 dokumen	395.744.666	Staf Subkoordinator Kerjasama Budaya
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri , Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan (%)	100%	100%	1.572.605.100	100%	1.737.728.647	100%	1.810.713.250	100%	1.823.388.242	100%	1.854.358.842	Subkoordinator Promosi Budaya dan Pariwisata
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				1.572.605.100		1.737.728.647		1.810.713.250		1.823.388.242		1.854.358.842	Subkoordinator Promosi Budaya dan Pariwisata
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	9 kegiatan	14 kegiatan	1.572.605.100	14 kegiatan	1.737.728.647	14 kegiatan	1.810.713.250	14 kegiatan	1.823.388.242	14 kegiatan	1.854.358.842	Staf Subkoordinator Promosi Budaya dan Pariwisata
Meningkatnya Pemasaran Promosi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Efektivitas Media Promosi (%)	8,5%	8,5%	1.619.942.694	8,5%	1.792.843.756	8,5%	1.866.745.212	8,5%	1.881.206.657	8,5%	1.914.012.237	Subkoordinator Informasi Budaya dan Pariwisata
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1.619.942.694		1.792.843.756		1.866.745.212		1.881.206.657		1.914.012.237	Subkoordinator Informasi Budaya
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	18 promosi	28 promosi	1.619.942.694	28 promosi	1.792.843.756	28 promosi	1.866.745.212	28 promosi	1.881.206.657	28 promosi	1.914.012.237	Staf Subkoordinator Informasi Budaya dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				903.869.870		999.495.347		1.041.116.006		1.048.761.130		1.066.794.394	Kepala Bidang Kelembagaan
Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi	25%	35%	903.869.870	40%	999.495.347	45%	1.041.116.006	50%	1.048.761.130	55%	1.066.794.394	Kepala Bidang Kelembagaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
pariwisata dan ekonomi kreatif	kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)												
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				903.869.870		999.495.347		1.041.116.006		1.048.761.130		1.066.794.394	Sub Koordinator/ Eselon IV Bidang Kelambagaan
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Profesional (%)	25%	35%	301.289.957	40%	333.165.116	45%	347.038.669	50%	349.587.043	55%	355.598.131	Subkoordinator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				301.289.957		333.165.116		347.038.669		349.587.043		355.598.131	Staf Subkoordinator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	1.787 orang	1.070 orang	301.289.957	1.084 orang	333.165.116	1.100 orang	347.038.669	1.118 orang	349.587.043	1.134 orang	355.598.131	Staf Subkoordinator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
Meningkatnya Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif		4 dokumen	301.289.957	4 dokumen	333.165.116	4 dokumen	347.038.669	4 dokumen	349.587.043	4 dokumen	355.598.131	Subkoordinator Kerjasama Organisasi Kepariwisataan
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				301.289.957		333.165.116		347.038.669		349.587.043		355.598.131	Staf Subkoordinator Kerjasama Organisasi Kepariwisataan
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)		1.065 orang	301.289.957	1.083 orang	333.165.116	1.100 orang	347.038.669	1.116 orang	349.587.043	1.133 orang	355.598.131	Staf Subkoordinator Kerjasama Organisasi Kepariwisataan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif (%)		100%	301.289.957	100%	333.165.116	100%	347.038.669	100%	349.587.043	100%	355.598.131	Subkoordinator Pengawasan Kepariwisataan
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				301.289.957		333.165.116		347.038.669		349.587.043		355.598.131	Staf Subkoordinator Pengawasan Kepariwisataan
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)		1.065 orang	301.289.957	1.083 orang	333.165.116	1.100 orang	347.038.669	1.116 orang	349.587.043	1.133 orang	355.598.131	Staf Subkoordinator Pengawasan Kepariwisataan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir (Tahun 2030)	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	16,25	13,56	14,91	14,30	13,80	13,32	12,90	12,90	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan retribusi jasa usaha dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang
2.	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan	%	1,17	1,05	1,17	1,17	1,18	1,18	1,20	1,20	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, retribusi jasa usaha dari UPTD Taman Budaya Raden Saleh dan Museum Kota Lama dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang
3.	Nilai Kemajuan Kebudayaan	Angka	78,12	72,07	72,64	73,33	73,95	74,56	75,13	75,13	Nilai Kemajuan Kebudayaan adalah nilai yang menunjukkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memajukan kebudayaan daerah, sebagaimana diturunkan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan
4.	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	15,07	12,52	13,74	13,13	12,62	12,14	11,70	11,70	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan, retribusi jasa usaha dari UPTD Tinjomoyo, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Kampoeng Wisata Taman lele, Wisma Semarang di Cibubur, Taman Lalu Lintas, Kampung Jawi dan Depok dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kota Semarang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan										
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	129,22	131,21	133,21	135,20	137,19	139,18	141,18	Rata-Rata Cagar Budaya Yang Dilestarikan Meliputi Bangunan, Situs dan Kawasan.
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	524	524	524	524	524	524	524	Jumlah Benda, Bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Telah Dilakukan Pengkajian Oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan Diinventarisasi.
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	698	700	700	700	700	700	700	Jumlah Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan). Jumlah Cagar Budaya Yang Sudah Dilakukan Pendaftaran Obyek Pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	11	14	14	14	14	14	14	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan dan Ditetapkan Dengan Penerbitan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Penetapan Cagar Budaya.
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	42,99	44,90	46,80	48,71	50,62	52,53	54,43	Rata-Rata Jumlah Sanggar Yang Tampil di Event Seni Budaya di Pemkot, Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil di Event Seni Budaya di Pemerintah Kota Semarang dan Jumlah Event Yang Menampilkan Seni Budaya Kota Semarang.
6	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	86,10	89,84	90,87	91,90	92,94	93,97	95,00	Tingkat Kearifan Budaya Lokal Digunakan Untuk Mengukur

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Sejauh mana Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal di Kota Semarang.
7	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	100	75,09	75,59	76,09	76,59	77,09	77,59	Rata-Rata Capaian Cagar Budaya Benda dan Cagar Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan.
8	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	3.690.645	4.641.338	6.645.650	8.649.962	10.654.274	12.658.586	14.662.898	Jumlah Pengunjung Pada Lokasi Dan Atau Bangunan Bersejarah Yang Memiliki Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan Seperti Museum, Bangunan Bersejarah, Masjid, Klenteng, Gereja, Makam, Monumen, Candi, Situs, Kawasan dan Lainnya.
9	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	70,21	70,25	70,95	71,65	72,35	73,05	73,78	Jumlah Kelompok Kesenian Yang Aktif Terlibat Atau Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam 1 Tahun Terakhir.
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										
1	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota	%	13,13	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	Mengukur Pertumbuhan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota. Dengan Formulasi Perhitungan Jumlah Wisatawan Tahun n – Jumlah Wisatawan Tahun n-1 dibagi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 dikalikan 100%. Jumlah Wisatawan Tahun n – Jumlah Wisatawan Tahun n – 1 adalah Jumlah Total Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Ke Kabupaten/Kota Pada Tahun Pelaporan Dikurangi Jumlah Total Wisatawan Nusantara Yang

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Berkunjung ke Kabupaten/Kota Pada Tahun Sebelumnya. Wisatawan Nusantara adalah Setiap Orang Yang Melakukan Perjalanan di Wilayah Teritori Suatu Negara (Dalam Negeri), Dengan Lama Perjalanan Kurang dari 6 Bulan dan Bukan Bertujuan Untuk Memperoleh Penghasilan di Tempat Yang Dituju. Maksud Kunjungan antara lain Melakukan Perjalanan ke Tempat atau Objek Wisata, Berlibur, Rekreasi dan Bisnis. Jumlah Wisatawan Tahun n-1 adalah Jumlah Total Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung ke Kabupaten/Kota Pada Tahun Sebelumnya.
2	Tingkat Hunian Akomodasi	%	57,48	57,57	57,67	57,76	57,85	57,94	58,04	Mengukur Tingkat Hunian Akomodasi Di Kabupaten/Kota. Dengan Formulasi Perhitungan Jumlah Kamar Yang Terjual Dibagi Jumlah Kamar Yang Tersedia Dikalikan 100%. Jumlah Kamar Yang Terjual Adalah Jumlah Total Kamar Yang Terjual Selama 365 Hari (1 Tahun) dari Setiap Akomodasi Pariwisata Yang Berada di Wilayah Kabupaten/Kota yaitu Meliputi Hotel, Vila, *Bungalow*, *Cottage*, Pondok Wisata, Wisma Atau Mess (*Guest House*), Kapal Pesiar, Karavan, Hotel Perahu, Flat, Apartemen, Kondominium dan Jenis Lainnya Yang Diperuntukkan Sebagai Akomodasi Pariwisata.

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Jumlah Kamar Yang Tersedia adalah Jumlah Total Kamar Yang Tersedia Selama 365 Hari (1 Tahun) dari Setiap Akomodasi Pariwisata Yang Berada di Wilayah Kabupaten/Kota yaitu Meliputi Hotel, Vila, *Bungalow*, *Cottage*, Pondok Wisata, Wisma Atau Mess (*Guest House*), Kapal Pesiar, Karavan, Hotel Perahu, Flat, Apartemen, Kondominium dan Jenis Lainnya Yang Diperuntukkan Sebagai Akomodasi Pariwisata.
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	24,30	28,79	41,58	54,37	67,16	79,95	92,74	Mengukur Tingkat Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara Yang Masuk ke Kabupaten/Kota Pada Hotel Berbintang. Dengan Formulasi Perhitungan Jumlah Wisatawan Tahun n – Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Dibagi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Dikalikan 100%. Jumlah Wisatawan Tahun n – Jumlah Wisatawan Tahun n – 1 adalah Jumlah Total Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke Kabupaten/Kota Pada Tahun Pelaporan Dikurangi Jumlah Total Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke Kabupaten/Kota Pada Tahun Sebelumnya. Wisatawan Mancanegara adalah Setiap Orang Yang Mengunjungi Suatu Negara di Luar Tempat Tinggalnya dan Lamanya Kunjungan Tersebut Tidak Lebih dari 12 (Dua Belas) Bulan. Maksud Kunjungan antara lain

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Berlibur, Rekreasi dan Olahraga, Serta Bisnis. Jumlah Wisatawan Tahun n-1 adalah Jumlah Total Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung Ke Kabupaten/Kota Pada Tahun Sebelumnya.
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,23	3,22	3,40	3,58	3,76	3,94	4,12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum adalah Perbandingan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Serta Makan Dan Minum Terhadap Total PDRB Daerah (Atas Dasar Harga Berlaku atau Harga Konstan), yang Dinyatakan Dalam Persen. Dengan Formulasi Perhitungan PDRB Sektor Akomodasi, Makan dan Minum Dibagi Total PDRB Dikalikan 100%. Data Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Permasalahan utama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu Kontribusi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga Kabupaten/Kota. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

Sebagai penutup, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Semarang beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang, sesuai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

23. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Sehubungan hal tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun

2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang juga perlu memperhatikan Renstra Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Indonesia, serta Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Dinas Arsip dan Perpustakaan, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

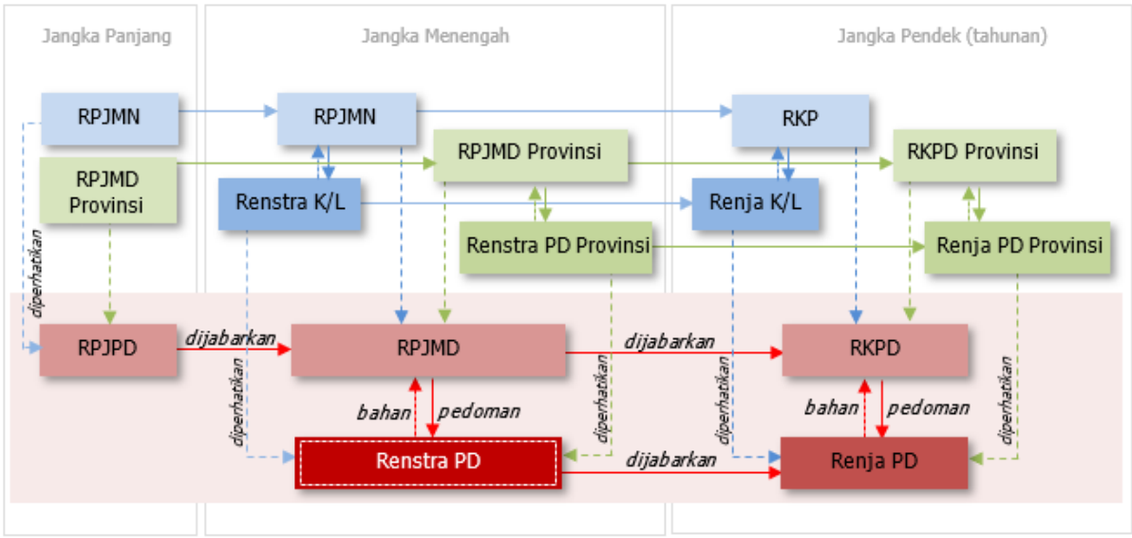

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 25 Agustus 2025 nomor B/4121/000.7.2.2/VIII/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029;
21. Surat Edaran Wali Kota Semarang nomor B/661/000.7.6.1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Arsip dan Perpustakaan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan **Peningkatan Tata Kelola Arsip Daerah dan Peningkatan Kualitas Literasi Masyarakat** guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 adalah :

a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
c. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
d. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Berisi gambaran pelayanan yang memuat tugas, fungsi, dan struktur, sumber daya, Kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok sasaran layanan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan. serta permasalahan dan isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan termasuk kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, serta Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Berisi memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berkaitan dengan tugas, fungsi serta struktur organisasi yang ada pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang telah tertuang di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Di dalam regulasi ini, kedudukan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam tatanan pemerintahan daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Dalam tatanan pemerintahan daerah Kota Semarang, Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki tugas membantu Walikota melaksanakaan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan, dan UPTD.
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dinas.
5. Penyelenggaraan Kerja Sama Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan.
6. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan, dan UPTD.
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan, dan UPTD.
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

A. Struktur Organisasi

Untuk memastikan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki, Dinas Arsip dan Perpustakaan telah disusun secara struktural sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Komposisi organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semmarang adalah sebagai berikut:

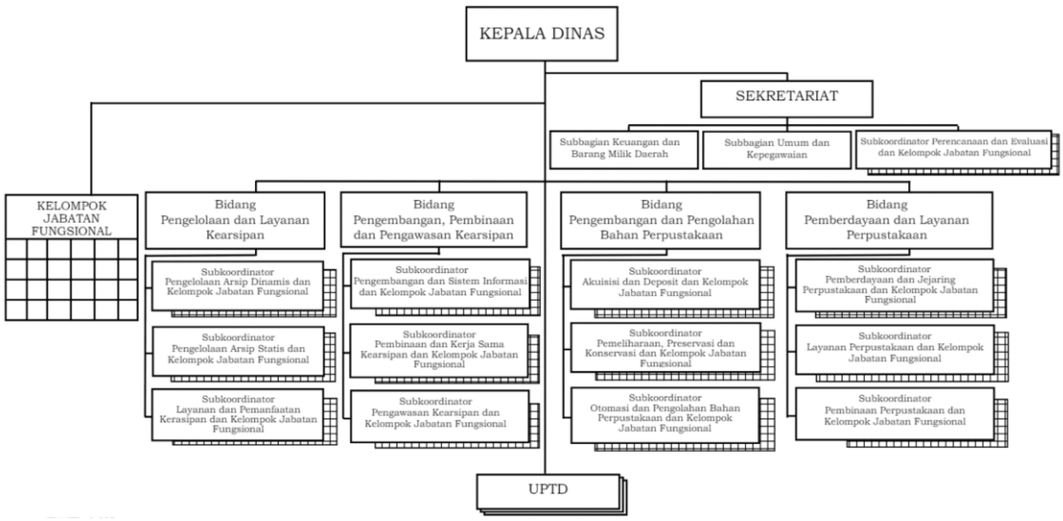

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021

B. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan, dan UPTD. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris memiliki tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugasnya seperti pada penjelasan di atas, sekretariat memiliki fungsi:

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bidang Pengembangan,

Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan, dan UPTD

d. Pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan, dan UPTD
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
f. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Kesekretariatan Dinas
g. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdan Manajemen Risiko Dinas
h. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
i. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Dinas
j. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
k. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas
l. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan asset dan barang milik daerah Dinas
m. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas
n. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahantanggapan pemeriksaan/pengawasan
o. Pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas
p. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas
q. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas
r. Pelaksanaan kegiatan tatakelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas
s. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas
t. Pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas
u. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas
v. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas
w. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas
x. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas
y. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasis serta penyusunan laporan program dan kegiatan

z. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang terdiri3 subbagian yakni Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasiatas. Masing-masing tugas Subbagian Sekretariat Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut:

a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian ini memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
5) Menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
6) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas
7) Menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas
8) Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas
9) Menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Dinas
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
12) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian ini memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SubbagianUmum dan Kepegawaian
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian

5) Menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas
6) Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan Inovasi Dinas
7) Menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas
8) Menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas
9) Menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas
10) Menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas
11) Menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas
12) Menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas
13) Menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas
14) Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas
15) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian
16) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian
17) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi

Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan perencanaan dan evaluasi. Subkoordinator ini memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi
5) Menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdan Manajemen Risiko Dinas
6) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

7) Menyiapkan kegiatan Evaluasi Kinerja Dinas
8) Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi
12) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan

Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala Bidang Pengelolan dan Layanan Kearsipan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis dan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan serta memiliki tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk dapat mewujudkan tugas sebagaimana mestinya, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
b. Pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
e. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, dan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
f. Pelaksanaan kegiatan alih media dalam rangka ketersediaan akses arsip dinamis
g. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan arsip dinamis antara lain namun tidak terbatas pada arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif
h. Pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyelamatan dan pemulihan arsip akibat bencana
i. Pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip yang telah habis retensinya dan sudah tidak memiliki nilai guna
j. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Pengelolaan Arsip Statis
k. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengolahan arsip statis
l. Pelaksanaan kegiatan akuisisi terhadap arsip statis sesuai prosedur yang telah diatur dalam peraturan
m. Pelaksanaan preservasi/perlindungan dan pengamanan arsip statis
n. Pelaksanaan penataan, pendataan dan autentifikasi arsip statis
o. Pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi guna pelayanan kearsipan
p. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan layanan jasa penyimpanan arsip
q. Pelaksanaan kegiatan pelayanan akses arsip guna pemanfaatan arsip
r. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pengelolaan dan Layananan Kearsipan

s. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
t. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan terdiri atas 3 subkoordinator, yakni Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis, Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis, dan Subkoordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan. Masing-masing tugas subkoordinator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis

Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis
5) Menyiapkan kegiatan alih media dalam rangka ketersediaan akses arsip dinamis
6) Menyiapkan pemeliharaan dan perawatan arsip dinamis antara lain namun tidak terbatas pada arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif
7) Menyiapkan kegiatan pencegahan, penyelamatan dan pemulihan arsip akibat bencana
8) Menyiapkan kegiatan penyusutan arsip yang telah habis retensinya dan sudah tidak memiliki nilai guna
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengelolaan Arsip Dinamis
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengelolaan Arsip Dinamis
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolan Arsip Dinamis
12) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis

Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait

4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengelolaan Arsip Statis
5) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pengolahan arsip statis
6) Menyiapkan kegiatan akuisisi terhadap arsip statis sesuai prosedur yang telah diatur dalam peraturan
7) Menyiapkan preservasi/perlindungan dan pengamanan arsip statis
8) Menyiapkan penataan, pendataan dan autentifikasi arsip statis
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengelolaan Arsip Statis
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengelolaan Arsip Statis
11) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Arsip Statis
12) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan

Subkoordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
5) Menyiapkan kegiatan penyediaan informasi guna pelayanan kearsipan
6) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan layanan jasa penyimpanan arsip
7) Menyiapkan kegiatan pelayanan akses arsip guna pemanfaatan arsip
8) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
9) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
10) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
11) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yan bersangkutan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4. Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pengembangan dan Sistem Informasi

Kearsipan, Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan, dan Pengawasan Kearsipan serta memiliki tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk dapat mewujudkan tugas sebagaimana mestinya, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
e. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan, Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan, dan Pengawasan Kearsipan
f. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengadaan arsiparis
g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis
h. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyediaan jaminan kesehatan serta tunjangan profesi arsiparis
i. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan kearsipan
j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
k. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)
l. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengelolaan Naskah Dinas Elektronik
m. Pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan
n. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan
o. Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kearsipan
p. Pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman kearsipan
q. Pelaksanaan kegiatan pemberian supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan
r. Pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan kerja sama layanan kearsipan
s. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Pengawasan Kearsipan
t. Pelaksanaan kegiatan audit kearsipan
u. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penilaian hasil Pengawasan Kearsipan
v. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan monitoring Pengawasan Kearsipan
w. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penegakan peraturan perundangundangan di bidang kearsipan
x. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
y. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
z. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

å. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 3 subkoordinator yakni Subkoodinator Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan, Subkoodinator Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan, dan Subkoodinator Pengawasan Kearsipan. Masing-masing tugas subkoordinator Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dijabarkan sebagai berikut:

a. Subkoodinator Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan

Subkoordinator Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan
5) Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan arsiparis
6) Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis
7) Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyediaan jaminan kesehatan serta tunjangan profesi arsiparis
8) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan kearsipan
9) Menyiapkan kegiatan pengelolaan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pengelolaan Naskah Dinas Elektronik
12) Menyiapkan pendayagunaan sarana dan prasarana Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan
13) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan
14) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan
15) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Sistem Informasi Kearsipan
16) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yan bersangkutan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subkoodinator Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan

Subkoordinator Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya

3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan
5) Menyiapkan kegiatan penyusunan kajian Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan
6) Menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kearsipan
7) Menyiapkan kegiatan penyusunan pedoman kearsipan
8) Menyiapkan kegiatan pemberian supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan
9) Menyiapkan kegiatan pengembangan jaringan kerja sama layanan kearsipan
10) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan
11) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan
12) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Kerja Sama Kearsipan
13) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yan bersangkutan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoodinator Pengawasan Kearsipan

Subkoordinator Pengawasan Kearsipan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengawasan Kearsipan
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengawasan Kearsipan
5) Menyiapkan kegiatan penyusunan kajian Pengawasan Kearsipan
6) Menyiapkan kegiatan audit kearsipan
7) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan penilaian hasil Pengawasan Kearsipan
8) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan monitoring Pengawasan Kearsipan
9) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan penegakan peraturan perundangundangan di bidang kearsipan
10) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengawasan Kearsipan
11) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengawasan Kearsipan
12) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kearsipan
13) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yan bersangkutan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Akuisisi dan Deposit, Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi dan Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan serta memiliki tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk dapat mewujudkan tugas sebagaimana mestinya, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
e. Pelaksanaan kegiatan Akuisisi dan Deposit, Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi, dan Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
f. Pelaksanaan kegiatan akuisisi dan deposit bahan perpustakaan
g. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengadaan bahan perpustakaan
h. Pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi bahan perpustakaan
i. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam
j. Pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman pengadaan bahan perpustakaan
k. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengorganisasian koleksi deposit antara lain namun tidak terbatas pada penyeleksian, penghimpunan, pengolahan, penginterpretasian dan pendayagunaan rekam karya cetak secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi
l. Pelaksanaan kegiatan layanan, pemeliharaan, perservasi dan konservasi bahan perpustakaan
m. Pelaksanaan kegiatan penyiangan dan pengelolaan jajaran bahan perpustakaan
n. Pelaksanaan kegiatan identifikasi bahan perpustakaan
o. Pelaksanaan kegiatan reproduksi bahan perpustakaan
p. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi perpustakaan daerah dan naskah kuno
q. Pelaksanaan kegiatan digitalisasi bahan perpustakaan
r. Pelaksanaan kegiatan kerja sama perpustakaan digital
s. Pelaksanaan kegiatan penyajian data dan informasi dalam bentuk digital
t. Pelaksanaan kegiatan pertukaran buku di masyarakat
u. Pelaksanaan kegiatan otomasi dan pengolahan bahan perpustakaan
v. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pedoman otomasi dan pengolahan bahan perpustakaan, penyusunan dan penerbitan literatur sekunder
w. Pelaksanaan kegiatan pengolahan bahan perpustakaan, antara lain namun tidak terbatas pada seleksi, inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi dan kelengkapan bahan perpustakaan

x. Pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terseleksi, layanan penelusuran bahan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
y. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
z. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
å. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
ä. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan terdiri atas 3 subkoordinator yakni Subkoordinator Akuisisi dan Deposit, Subkoordinator Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi, dan Subkoordinator Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Masing-masing tugas subkoordinator Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dijabarkan sebagai berikut:

a. Subkoordinator Akuisisi dan Deposit

Subkoordinator Akuisisi dan Deposit memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Akuisisi dan Deposit
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Akuisisi dan Deposit
5) Menyiapkan kegiatan akuisisi dan deposit bahan perpustakaan
6) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengadaan bahan perpustakaan
7) Menyiapkan kegiatan pengembangan koleksi bahan perpustakaan
8) Menyiapkan kegiatan penghimpunan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan pedoman pengadaan bahan perpustakaan
10) Menyiapkan kegiatan pengkajian dan pengorganisasian koleksi deposit antara lain namun tidak terbatas pada penyeleksian, penghimpunan, pengolahan, penginterpretasian dan pendayagunaan rekam karya cetak secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi
11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Akuisisi dan Deposit
12) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Akuisisi dan Deposit
13) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Akuisisi dan Deposit
14) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yan bersangkutan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi

Subkoordinator Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi
5) Menyiapkan kegiatan layanan, pemeliharaan, perservasi dan konservasi bahan perpustakaan
6) Menyiapkan kegiatan penyiangan dan pengelolaan jajaran bahan perpustakaan
7) Menyiapkan kegiatan identifikasi bahan perpustakaan
8) Menyiapkan kegiatan reproduksi bahan perpustakaan
9) Menyiapkan kegiatan pemeliharaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi perpustakaan daerah dan naskah kuno
10) Menyiapkan kegiatan digitalisasi bahan perpustakaan
11) Menyiapkan kegiatan Kerja Sama perpustakaan digital
12) Menyiapkan kegiatan penyajian data dan informasi dalam bentuk digital
13) Menyiapkan kegiatan pertukaran buku di masyarakat
14) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi
15) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi
16) Menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi
17) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yan bersangkutan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Subkoordinator Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
5) Menyiapkan kegiatan Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
6) Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pedoman Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, penyusunan dan penerbitan literatur sekunder
7) Menyiapkan kegiatan pengolahan bahan perpustakaan, antara lain namun tidak terbatas pada seleksi, inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi dan kelengkapan bahan perpustakaan

8) Menyiapkan kegiatan penyebaran informasi terseleksi, layanan penelusuran bahan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
11) Menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
12) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan

Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan, Layanan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan serta memiliki tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk dapat mewujudkan tugas sebagaimana mestinya, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan
e. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan, Layanan Perpustakaan, dan Pembinaan Perpustakaan
f. Pelaksanaan menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan
g. Pelaksanaan kegiatan pembuatan data statistik, identifikasi dan pemetaan perpustakaan dalam rangka pemberdayaan perpustakaan
h. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, telaahan dan survei perpustakaan
i. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, bahan dan survei minat pemustaka dan bahan perpustakaan
j. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyajian karya ilmiah yang dihasilkan Aparatur Sipil Negara didaerah
k. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi kegiatan perpustakaan
l. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan publikasi, sosialisasi dan promosi antara lain namun tidak terbatas pada media elektronik, media cetak, media sosial, website, Tatap muka, lomba, sayembara, festival, ekspo, pameran dan bazar
m. Pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan budaya baca masyarakat
n. Pelaksanaan kegiatan promosi pengembangan minat baca antara lain namun tidak terbatas pada road show, workshop, dan bedah buku

o. Pelaksanaan kegiatan publikasi produk perpustakaan antara lain namun tidak terbatas pada pembuatan reklame, pamflet, leaflet, buletin, majalah, buku pedoman pengelolaan perpustkaan, booklet, stiker, media sosial dan naskah siaran radio dan TV
p. Pelaksanaan kegiatan promosi gemar membaca dan cinta perpustakaan
q. Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi pemerintah/swasta, masyarakat
r. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas perpustakaan rumah pintar, taman baca masyarakat, pojok baca atau sudut baca
s. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan rumah pintar, taman baca masyarakat, pojok baca atau sudut baca
t. Pelaksanaan kegiatan layanan umum yang antara lain namun tidak terbatas pada layanan keanggotaan, layanan sirkulasi, layanan audio visual, layanan storytelling, wisata buku, layanan perpustakaan antara lain namun tidak terbatas padainternet, multimedia, scanning, printing, typing, dan komputer, layanan penelusuran bahan perpustakaan baik secara manual maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi
u. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan Kerja Sama layanan perpustakaan
v. Pelaksanaan kegiatan layanan hasil analisis kepustakaan berupa resensi dan reviu
w. Pelaksanaan kegiatan pengolahan dan menyusun statistik layanan perpustakaan antara lain namun tidak terbatas pada statistik anggota perpustakaan, peminjam, pengunjung, buku yang dipinjam dan dibaca
x. Pelaksanaan kegiatan layanan khusus yang antara lain namun tidak terbatas pada layanan referensi, layanan masyarakat berkebutuhan khusus, layanan koleksi khusus
y. Pelaksanaan kegiatan layanan referensi dan rujukan antara lain namun tidak terbatas pada penelusuran literatur khusus yang terdapat di Perpustakaan
z. Pelaksanaan kegiatan layanan koleksi khusus kepada Pemustaka
å. Pelaksanaan kegiatan layanan untuk masyarakat berkebutuhan khusus
ä. Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama layanan perpustakaan berkebutuhan khusus dengan lembaga, organisasi, yayasan profesional yang menangani masyarakat disabilitas
ö. Pelaksanaan kegiatan layanan ekstensi perpustakaan antara lain namun tidak terbatas pada mobil Unit Perpustakaan Keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan dan melaksanakan pembuatan pemetaan titik layanan mobil Unit Perpustakaan Keliling
aa. Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama layanan perpustakaan antara lain namun tidak terbatas pada silang layan antar perpustakaan dengan semua jenis perpustakaan
bb. Pelaksanaan kegiatan storytelling, layanan internet dan multimedia dalam layanan ekstensi perpustakaan
cc. Pelaksanaan kegiatan survei lokasi layanan ekstensi perpustakaan
dd. Pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penunjang sebagai reward dalam pelaksanaan kegiatan layanan ekstensi perpustakaan
hh. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perpustakaan

ff. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan identifikasi, serta analisis pembinaan perpustakaan
gg. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Pembinaan Perpustakaan Sekolah atau Madrasah
hh. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah atau Madrasah
ii. Pelaksanaan kegiatan bimbingan pemantauan supervisi dan konsultasi teknis terhadap tenaga teknis pengelola perpustakaan daerah
jj. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia perpustakaan meliputi bimbingan teknis, *in house training*, orientasi lapangan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan serta pemberian penghargaan
kk. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi rekomendasi sertifikasi pustakawan
ll. Pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi terhadap tenaga teknis perpustakaan daerah
mm. Pelaksanaan kegiatan penyusunan regulasi, standarisasi dan kompetensi sumber daya perpustakaan
nn. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi dan standarisasi perpustakaan
oo. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi akreditasi perpustakaan untuk semua jenis perpustakaan
pp. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan
qq. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan
rr. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan
ss. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan terdiri atas 3 subkoordinator yakni Subkoordinator Pemberdayaan, Subkoordinator Layanan Perpustakaan dan Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan. Masing-masing tugas subkoordinator Bidang Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan dijabarkan sebagai berikut:

a. Subkoordinator Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan

Subkoordinator Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan
5) Menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan
6) Menyiapkan kegiatan pembuatan data statistik, identifikasi dan pemetaan perpustakaan dalam rangka pemberdayaan perpustakaan

7) Menyiapkan kegiatan penelitian, pengkajian, telaahan dan survei perpustakaan
8) Menyiapkan kegiatan pengumpulan data, bahan dan survei minat pemustaka dan bahan perpustakaan
9) Menyiapkan kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyajian karya ilmiah yang dihasilkan Aparatur Sipil Negara didaerah
10) Menyiapkan kegiatan dokumentasi kegiatan perpustakaan
11) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan publikasi, sosialisasi dan promosi antara lain namun tidak terbatas pada media elektronik, media cetak, media sosial, website, Tatap muka, lomba, sayembara, festival, ekspo, pameran dan bazar
12) Menyiapkan kegiatan pemasyarakatan budaya baca masyarakat
13) Menyiapkan kegiatan promosi pengembangan minat baca antara lain namun tidak terbatas pada road show, workshop, dan bedah buku; n.
14) Menyiapkan kegiatan publikasi produk perpustakaan antara lain namun tidak terbatas pada pembuatan reklame, pamflet, leaflet, buletin, majalah, buku pedoman pengelolaan perpustkaan, booklet, stiker, media sosial dan naskah siaran radio dan TV
15) Menyiapkan kegiatan promosi gemar membaca dan cinta perpustakaan
16) Menyiapkan kegiatan Kerja Sama, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi pemerintah/swasta, masyarakat
17) Menyiapkan kegiatan peningkatan kualitas perpustakaan rumah pintar, taman baca masyarakat, pojok baca atau sudut baca
18) Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan rumah pintar, taman baca masyarakat, pojok baca atau sudut baca
19) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan
20) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan
21) Menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan
22) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Subkoordinator Layanan Perpustakaan

Subkoordinator Layanan Perpustakaan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Layanan Perpustakaan
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Layanan Perpustakaan
5) Menyiapkan kegiatan layanan umum yang antara lain namun tidak terbatas pada layanan keanggotaan, layanan sirkulasi, layanan audio visual, layanan story telling, wisata buku, layanan

perpustakaan antara lain namun tidak terbatas padainternet, multimedia, scanning, printing, typing, dan komputer, layanan penelusuran bahan perpustakaan baik secara manual maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi

6) Menyiapkan kegiatan pembangunan jaringan Kerja Sama layanan perpustakaan
7) Menyiapkan kegiatan layanan hasil analisis kepustakaan berupa resensi dan reviu
8) Menyiapkan kegiatan pengolahan dan menyusun statistik layanan perpustakaan antara lain namun tidak terbatas pada statistik anggota perpustakaan, peminjam, pengunjung, buku yang dipinjam dan dibaca
9) Menyiapkan kegiatan layanan khusus yang antara lain namun tidak terbatas pada layanan referensi, layanan masyarakat berkebutuhan khusus, layanan koleksi khusus
10) Menyiapkan kegiatan layanan referensi dan rujukan antara lain namun tidak terbatas pada penelusuran literatur khusus yang terdapat di Perpustakaan
11) Menyiapkan kegiatan layanan koleksi khusus kepada Pemustaka
12) Menyiapkan kegiatan layanan untuk masyarakat berkebutuhan khusus
13) Menyiapkan kegiatan Kerja Sama layanan perpustakaan berkebutuhan khusus dengan lembaga, organisasi, yayasan profesional yang menangani masyarakat disabilitas
14) Menyiapkan kegiatan layanan ekstensi perpustakaan antara lain namun tidak terbatas pada mobil Unit Perpustakaan Keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan dan melaksanakan pembuatan pemetaan titik layanan mobil Unit Perpustakaan Keliling
15) Menyiapkan kegiatan Kerja Sama layanan perpustakaan antara lain namun tidak terbatas pada silang layan antar perpustakaan dengan semua jenis perpustakaan
16) Menyiapkan kegiatan story telling, layanan internet dan multimedia dalam layanan ekstensi perpustakaan
17) Menyiapkan kegiatan survei lokasi layanan ekstensi perpustakaan
18) Menyiapkan kegiatan penyiapan bahan penunjang sebagai reward dalam pelaksanaan kegiatan layanan ekstensi perpustakaan
19) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Layanan Perpustakaan
20) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Layanan Perpustakaan
21) Menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Perpustakaan
22) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan

Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembinaan Perpustakaan
2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pembinaan Perpustakaan
5) Menyiapkan kegiatan Pembinaan Perpustakaan
6) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan identifikasi, serta analisis pembinaan perpustakaan
7) Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Pembinaan Perpustakaan Sekolah atau Madrasah
8) Menyiapkan kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah atau Madrasah
9) Menyiapkan kegiatan bimbingan pemantauan supervisi dan konsultasi teknis terhadap tenaga teknis pengelola perpustakaan daerah
10) Menyiapkan kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia perpustakaan meliputi bimbingan teknis, in house training, orientasi lapangan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan serta pemberian penghargaan
11) Menyiapkan kegiatan fasilitasi rekomendasi sertifikasi pustakawan
12) Menyiapkan kegiatan pengembangan profesi terhadap tenaga teknis perpustakaan daerah; m. menyiapkan kegiatan penyusunan regulasi, standarisasi dan kompetensi sumber daya perpustakaan
13) Menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi dan standarisasi perpustakaan
14) Menyiapkan kegiatan fasilitasi akreditasi perpustakaan untuk semua jenis perpustakaan
15) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pembinaan Perpustakaan
16) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pembinaan Perpustakaan
17) Menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perpustakaan
18) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Sumber daya dalam suatu instansi atau badan usaha mencakup seluruh aset yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menjalankan operasionalnya. Ini mencakup aset fisik seperti gedung, peralatan, dan teknologi, serta sumber daya manusia, keuangan, dan informasi. Sumber daya manusia merupakan komponen kunci yang melibatkan karyawan, manajemen, dan staf lainnya yang berkontribusi pada operasional sehari-hari dan pertumbuhan jangka panjang organisasi.

Selain itu, sumber daya keuangan, termasuk modal dan aset keuangan lainnya, sangat penting untuk menjalankan operasi bisnis. Informasi, baik internal maupun eksternal, juga merupakan sumber daya esensial karena memberikan wawasan dan pemahaman yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pengelolaan efektif semua sumber daya ini adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan organisasi dalam pasar yang kompetitif. Dengan memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, instansi atau badan usaha dapat mencapai efisiensi operasional, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks instansi atau badan usaha mencakup semua individu yang bekerja di dalamnya dan dianggap sebagai aset paling berharga organisasi. SDM tidak hanya terdiri dari karyawan yang menjalankan tugas operasional sehari-hari, tetapi juga manajemen dan staf lainnya yang berperan penting dalam kesuksesan organisasi. Peran SDM meliputi pengelolaan proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, serta pengelolaan kebijakan dan budaya organisasi yang mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan.

Pentingnya SDM dalam instansi atau badan usaha tidak bisa diabaikan, karena mereka merupakan faktor penentu dalam pencapaian tujuan organisasi. SDM yang berkualitas dan terampil dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang efektif menjadi prioritas utama bagi manajemen untuk memastikan organisasi dapat bersaing secara efektif di pasar dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Tahun 2023 memiliki 75 pegawai bersatatus ASN dan 14 pegawai bersatatus Non ASN. Dilihat dari tingkat pendidikannya mayoritas pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang berpendidikan D3 sebanyak 39 orang (45,88%) dan berpendidikan S1 sebanyak 35 orang (39,33%). Meskipun demikian hingga tahun 2023 terdapat sebanyak 5 orang pegawai yang berpendidikan S2 (5,88%) dan 1 orang pegawai telah berpendidikan S3 (1,18%). Secara rinci kondisi jumlah pegawai berdasarkan pendidikan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

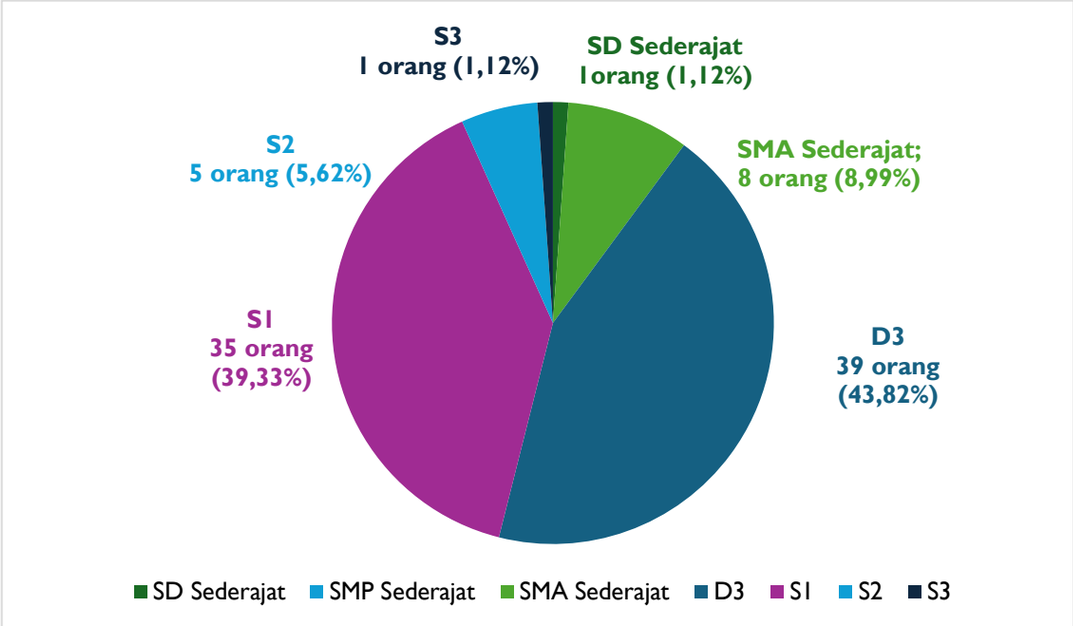

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Gambar 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025

Selanjutnya secara rinci informasi mengenai kualifikasi pendidikan dari sumber daya manusia yang tergabung dalam Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dapat ditemukan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN		NON-ASN		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
3	SMA Sederajat	1	3	4	-	8
4	D3	13	26	-	-	39
5	S1	9	17	3	6	35
6	S2	2	3	-	-	5
7	S3	1	-	-	-	1
Jumlah		**26**	**49**	**8**	**6**	**89**

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

Selanjutnya dilihat dari golongan mayoritas pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang merupakan pegawai berstatus Golongan II sebanyak 37 orang pegawai dan Golongan III sebanyak 31 orang pegawai. Sisanya sebanyak 7 orang pegawai merupakan Golongan IV dan masih terdapat 14 orang pegawai yang merupakan pagawai Non Golongan. Secara rinci kondisi jumlah pegawai berdasarkan Golongan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

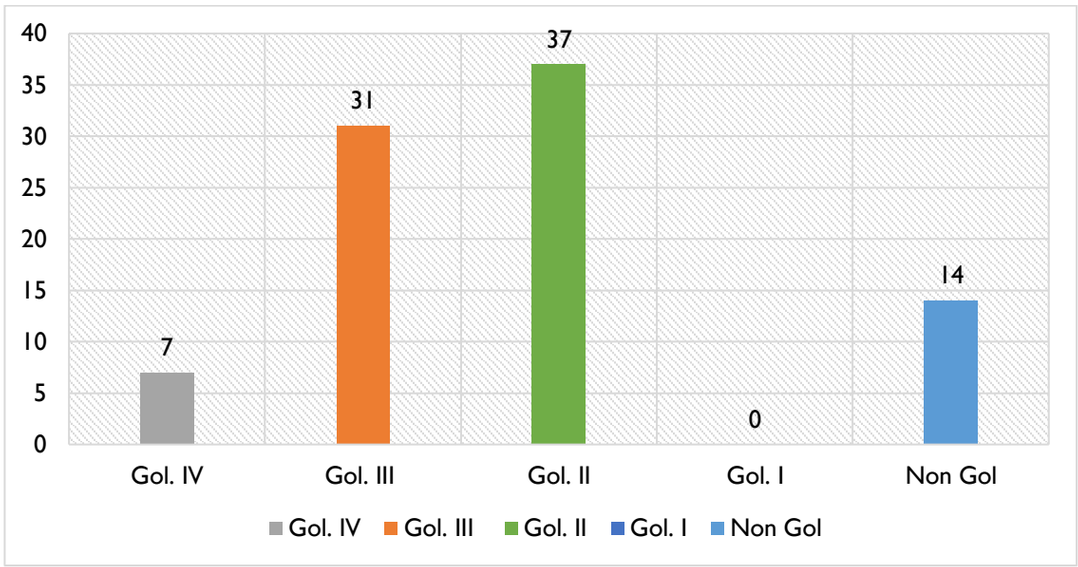

Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

Selanjutnya dilihat dari tingkat eselon dan golongannya mayoritas pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang merupakan pegawai berstatus JFT dengan jumlah sebanyak 46 pegawai, terbagi ke dalam 17 pegawai JFT Golongan III dan 29 orang pegawain JFT Golongan II. Selain itu terdapat 13 pegawai berstatus JFU terbagi dalam 5 pegawain masuk Golongan III dan 8 pegawai masuk Golongan II. Namun meskipun demikian di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang hingga tahun 2023 masih terdapat 10 pegawai berstatus kontrak atau Non ASN yang menjadi pegawai Non Golongan. Secara rinci kondisi jumlah pegawai berdasarkan Golongan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025

NO	ESELON	GOLONGAN					
		IV	III	II	I	NON-GOL	TOTAL
1	II b	1	-	-	-	-	**1**
2	III a	1	-	-	-	-	**1**
3	III b	4	-	-	-	-	**4**
4	IV a	1	9	-	-	-	**10**
5	Non Eselon	-	-	-	-	-	**-**
a	JFU	-	5	8	-	-	**13**
b	JFT	-	17	29	-	-	**46**
6	Non ASN	-	-	-	-	14	**14**
Jumlah		**7**	**31**	**37**	**-**	**14**	**89**

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

B. Sumber Daya Aset (Sarana dan Prasarana)

Sumber daya sarana dan prasarana dalam konteks instansi atau badan usaha merujuk pada infrastruktur fisik, fasilitas, dan peralatan yang mendukung operasi dan kegiatan organisasi. Ini mencakup berbagai elemen seperti gedung kantor, pabrik, gudang, fasilitas produksi, jaringan komunikasi, perangkat keras komputer, peralatan teknis, dan fasilitas transportasi. Sarana dan prasarana ini merupakan fondasi penting bagi keberhasilan operasional organisasi, karena menyediakan lingkungan yang

memadai bagi karyawan untuk bekerja, menyimpan atau memproses barang atau informasi, serta menyalurkan produk atau layanan kepada pelanggan.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, yang berasal dari APBD maupun APBN, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	A.C. Split	√		11
2	A.C. Window	√		2
3	Air Conditioning (AC)	√		4
4	Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	√		5
5	Alat Kantor Lainnya	√		4
6	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	√		1
7	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain lainnya (dst)	√		1
8	Alat Pemadam/Portable	√		3
9	Alat Pemotong Kertas	√		1
10	Alat Pengaman / Sinyal	√		1
11	Alat Penghancur Kertas	√		3
12	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	√		1
13	Alat Rumah Tangga Lain-lain	√		2
14	Amplifier	√		4
15	Antene Penerima VHF	√		2
16	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	√		1
17	Audio Amplifier	√		1
18	Bangku Tunggu	√		1
19	Brandkas	√		1
20	Buffet Kayu	√		2
21	Camera Digital	√		5
22	Camera Film	√		1
23	Camera Video	√		3
24	Compact Disc Player	√		5
25	Computer Compatible	√		2
26	CPU (Peralatan Mini Komputer)	√		1
27	Dehumidifier (Humidity Control)	√		1
28	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	√		3
29	Dispenser	√		5
30	Display	√		1
31	DVD Player	√		1
32	Electronic/Electric	√		1
33	Emergency Trolley	√		1
34	Equalizer	√		1
35	Evaporator	√		1
36	Exhause Fan	√		1
37	Facsimile	√		2
38	Filing Cabinet Besi	√		14
39	Filing Cabinet Kayu	√		6
40	Generator Set (Lab Scale)	√		1
41	Generator Set(Lab Scale)	√		1
42	Genset	√		2
43	Handy Cam	√		2
44	Handy Talky (HT)	√		2
45	Hard Disk	√		8
46	Head Set	√		3
47	Jam Elektronik	√		1
48	Kardex Besi	√		5
49	Kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	√		5
50	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	√		3
51	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	√		1
52	Kipas Angin	√		6
53	Kitchen Set	√		1
54	Komputer Jaringan lainnya	√		1
55	Komputer Unit Lainnya	√		2

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
56	Kotak Alat-alat Peraga Metode SAS	√		1
57	Kursi Biasa	√		4
58	Kursi Dorong	√		1
59	Kursi Fiber Glas/Plastik	√		5
60	Kursi Kayu	√		1
61	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	√		13
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	√		2
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√		2
64	Kursi Lipat	√		17
65	Kursi Putar	√		4
66	Kursi Rapat	√		2
67	Kursi Tamu	√		1
68	Lap Top	√		24
69	Layar Film/Projector	√		8
70	Layar Proyektor	√		2
71	LCD Projector/Infocus	√		2
72	Lemari Arsip Pejabat lainnya	√		3
73	Lemari Besi/Metal	√		10
74	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	√		2
75	Lemari Es	√		2
76	Lemari Kaca	√		6
77	Lemari Kayu	√		6
78	Lemari Penyimpan	√		1
79	Lemari Sorok	√		1
80	Line Printer	√		2
81	Local Area Network (LAN)	√		4
82	Locker	√		1
83	Loudspeaker	√		1
84	Megaphone	√		1
85	Meja 1/2 Biro	√		19
86	Meja Bundar	√		2
87	Meja Kerja	√		9
88	Meja Kerja Besi/Metal	√		1
89	Meja Kerja Kayu	√		15
90	Meja Kerja Pejabat Eselon II	√		1
91	Meja Kerja Pejabat Eselon III	√		1
92	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	√		1
93	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	√		1
94	Meja Komputer	√		3
95	Meja Operator	√		1
96	Meja Panjang	√		14
97	Meja Podium	√		1
98	Meja Rapat	√		2
99	Meja Rapat Pejabat lainnya	√		1
100	Meja Resepsionis	√		3
101	Meja Tambahan	√		4
102	Meja Tamu Biasa	√		1
103	Mesin Absensi	√		1
104	Mesin Fotocopy Folio	√		1
105	Mesin Fotocopy Lainnya	√		2
106	Mesin Jilid	√		1
107	Mesin Kertas	√		3
108	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	√		1
109	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	√		3
110	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	√		1
111	Meubeleur lainnya	√		3
112	Microphone	√		1
113	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	√		1
114	Miniatur	√		1
115	Mobil Ambulance	√		1
116	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	√		4
117	Mobil Workshop	√		1
118	Modem	√		3
119	Monitor	√		3
120	Note Book	√		7
121	P.C Unit	√		26
122	Palm Top	√		2

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
123	Papan Nama Instansi	√		87
124	Papan Pengumuman	√		2
125	Papan Tulis	√		2
126	Papan Visual/Papan Nama	√		50
127	Peralatan Cetak lainnya	√		1
128	Peralatan Cetak lainnya	√		1
129	Peralatan Personal Komputer lainnya	√		5
130	Peralatan studio audio lainnya (dst)	√		2
131	Peralatan umum lainnya (dst)	√		8
132	Personal Computer	√		4
133	Pesawat Telephone	√		1
134	Pick Up	√		1
135	Pompa Air	√		1
136	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	√		1
137	Portable Generating Set	√		1
138	Printer	√		2
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√		30
140	Proyector Spider Bracket	√		1
141	Rak Besi	√		24
142	Rak Kayu	√		59
143	Rak-Rak Penyimpan	√		4
144	Refrigerator	√		1
145	Rotary Filling	√		1
146	Router	√		1
147	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	√		6
148	Scanner (Universal Tester)	√		5
149	Sepeda Motor	√		13
150	Serial Scanner/Printer	√		3
151	Server	√		3
152	Sofa	√		6
153	Software Conf Off-Line Computer	√		1
154	Sound System	√		22
155	Speaker Komputer	√		2
156	Stabilisator	√		2
157	Stabilizing Amplifier	√		1
158	Station Wagon	√		3
159	Stationary Generating Set	√		2
160	Tablet PC	√		2
161	Tangki Air	√		1
162	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	√		1
163	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	√		1
164	Televisi	√		13
165	Tenda	√		3
166	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	√		2
167	Tiang Bendera	√		1
168	Tripod Camera	√		1
169	Tustel	√		8
170	TV Monitor	√		7
171	Uninterruptible Power Supply (UPS)	√		3
172	Unit Power Supply	√		2
173	Up Right Chiller/Frezzer	√		1
174	Vacum Evaporator	√		2
175	Video Conference	√		1
176	Video Printer	√		1
177	Video Tape Recorder Portable	√		1
178	White Board	√		3
179	Wireless	√		11

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Selain pada inventarisasi sarana dan prasarana milik Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, peninjauan aset dinas juga dilakukan pada aset tanah dan bangunan yang dimiliki. Berikut merupakan tabel aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Tabel 2. 4 Gedung dan Bangunan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

JENIS BARANG	KONDISI	LUAS LANTAI	ALAMAT	STATUS	ASAL	HARGA
Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1430 m^2	Jl. Prof Soedarto No. 116	Milik Pemda	APBD	Rp. 2.486.431.000

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi dijalankan dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Prinsip ini dilaksanakan dengan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang berarti penanganan urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Capaian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan

Agar pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Hal ini bertujuan agar kinerja pemerintahan daerah tetap selaras dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dituntut untuk terus melakukan pelayanan terhadap Masyarakat di lingkup wilayah Kota Semarang sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam setiap bidang tugasnya dibagi menjadi berbagai tingkat pencapaian, yang terperinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK / SPM / NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	**Indikator Sasaran Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan 2021-2026**																		
1.	Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun (IKK)	Persen			n/a	n/a	45	46	47	n/a	n/a	67,03	69,17	69,59	n/a	n/a	148,96%	150,37%	148%
2.	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	Persen			n/a	n/a	56	57	58	n/a	n/a	57	59,80	64,30	n/a	n/a	100%	104,91%	110%
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya	Persen			n/a	n/a	77	78	79	n/a	n/a	79,02	75,7	80,76	n/a	n/a	102,62%	97,05%	102,2%
4.	Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat	Persen			n/a	n/a	56	57	58	n/a	n/a	59,8	70,78	71,58	n/a	n/a	106,79%	124,18%	123,4%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persen			n/a	n/a	91	92	93	n/a	n/a	84,195	87,996	91,27	n/a	n/a	92,52%	95,65%	98,13%
6.	Meningkatnya nilai AKIP OPD	Nilai			n/a	n/a	80	81	82	n/a	n/a	70,31	75,70	73,40	n/a	n/a	87,89%	93,46%	89,5
B	**Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan**																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK / SPM / NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen			n/a	n/a	45	46	47	n/a	n/a	67,03	69,17	69,59	n/a	n/a	148,96%	150,37%	148%
2.	Persentase Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	Persen			n/a	n/a	56	57	58	n/a	n/a	57,05	59,80	64,30	n/a	n/a	101,88%	104,91%	110%
3.	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya	Persen			n/a	n/a	77	78	79	n/a	n/a	79,02	80,76	80,76	n/a	n/a	102,62%	103,54%	102,2%
4.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat	Persen			n/a	n/a	57	58	59	n/a	n/a	59,80	70,78	71,58	n/a	n/a	104,91%	122,03%	123,4%
C	**Indikator Program Dinas Arsip dan Perpustakaan**																		
1.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio			n/a	n/a	1	1	1	n/a	n/a	1	0,93	1	n/a	n/a	100%	107%	100%
2.	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	Persen			n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100%	100%
3.	Persentase jumlah arsip musnah	Persen			n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100%	100%
4.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke	Persen			n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK / SPM / NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	dalam sisye pemerintahan berbasis elektronik																		
5.	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Persen			n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100%	100%
6.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persen			n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100%	100%
7.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen			n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100%	100%
8.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persen			n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100%	100%

Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan literasi dan pengelolaan arsip yang akuntabel.

Indikator Sasaran Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan 2021–2026

1. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat: Realisasi tahun 2022 mencapai 67,03 dari target 45 (148,96%) dan tahun 2023 mencapai 69,17 dari target 46 (150,37%). Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap aktivitas membaca, didukung oleh program literasi dan pengembangan layanan perpustakaan.
2. Keberadaan dan Keutuhan Arsip: Realisasi 2022 dan 2023 masing-masing melampaui target, mencapai 104,46% dan 104,91%.
   Ini mencerminkan perbaikan dalam sistem penyelamatan arsip dinamis dan statis sebagai wujud pertanggungjawaban birokrasi.
3. Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas: Realisasi tahun 2022 melebihi target (102,62%), meskipun sedikit menurun pada 2023 (97,05%).
   Meskipun masih tinggi, perlu perhatian untuk menjaga konsistensi ketersediaan arsip penting yang relevan dengan pelaporan kinerja dan hukum.
4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat: Realisasi capaian meningkat signifikan dari 59,80 (2022) menjadi 70,78 (2023), jauh melampaui target (106,79% dan 124,18%). Capaian ini mengindikasikan dampak positif dari kolaborasi pustakawan, masyarakat, dan program literasi berbasis inklusi sosial.
5. Kualitas Pelayanan Publik: Meski belum mencapai target penuh (92,52% dan 95,65%), terdapat tren perbaikan yang konsisten.
   Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan SDM dan digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan.
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP): Terdapat peningkatan dari 70,31 (2022) ke 75,70 (2023), mendekati target. Menandakan kinerja manajerial dan pelaporan semakin tertata.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

IKU bersifat langsung mencerminkan output utama instansi: Seluruh indikator IKU menunjukkan capaian di atas target, khususnya pada:

- Kegemaran membaca masyarakat: melebihi target 150% (tahun 2023).
- Ketersediaan arsip sebagai alat bukti: stabil di atas 100%.
- Indeks Pembangunan Literasi: mengalami lompatan capaian di tahun 2023 hingga 122,03% dari target.

Capaian ini menunjukkan program strategis utama dinas berhasil berjalan efektif.

Indikator Program Teknis dan Pendukung

- Semua indikator program (rasio SDM, pelindungan koleksi, pemusnahan arsip, integrasi sistem, perizinan arsip tertutup, pelaporan keuangan, sarana prasarana) menunjukkan capaian 100% atau lebih.

- Beberapa bahkan menunjukan rasio di atas 100%, misalnya ketercukupan tenaga perpustakaan yang mencapai 107% pada 2023.

Capaian ini menggambarkan bahwa seluruh program pendukung dijalankan dengan konsistensi tinggi dan efisiensi manajerial yang baik.

B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan

Bagian ini akan menjelaskan anggaran dan penggunaan dana yang direalisasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Dalam konteks ini, akan diuraikan tahun-tahun di mana rasio antara penggunaan dana yang direalisasikan dan anggaran dapat dianggap baik atau kurang baik, serta aspek-aspek di mana kinerja tersebut dinilai baik atau kurang baik. Selanjutnya, akan dibahas faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Hasil interpretasi ini bertujuan untuk menggambarkan potensi dan tantangan dalam pendanaan layanan yang disediakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022-2024

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.952.285.000	9.876.543.210	10.653.387.503	12.406.592.224	14.350.193.364	8.397.700.000	9.460.000.000	9.991.353.574	11.888.452.305	13.926.949.468	93,79%	95,82%	93,79%	95,82%	97,05%	11.247.800.260	10.732.891.069
2	Program Pembinaan Perpustakaan	1.203.456.000	1.350.876.000	1.497.267.735	1.778.895.140	1.954.956.963	1.125.000.000	1.230.000.000	1.399.972.268	1.617.867.047	1.865.887.233	93,50%	90,95%	93,50%	90,95%	95,44%	1.557.090.368	1.447.745.310
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	85.600.000	98.900.000	122.786.780	239.111.100	227.682.360	76.400.000	88.700.000	109.568.522	232.761.580	220.167.206	89,23%	97,34%	89,23%	97,34%	96,70%	154.816.048	145.519.462
4	Program Pengelolaan Arsip	190.000.000	230.000.000	292.884.830	655.140.167	489.310.533	183.000.000	210.000.000	282.213.454	572.815.683	444.494.801	96,36%	87,43%	96,36%	87,43%	90,84%	371.467.106	338.504.788
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	150.000.000	210.000.000	280.545.070	446.413.068	364.759.986	138.500.000	185.000.000	258.896.249	395.854.525	325.010.556	92,28%	88,67%	92,28%	88,67%	89,10%	290.343.625	260.652.266
6	Program Perizinan Penggunaan Arsip	8.500.000	10.300.000	11.575.240	49.115.640	47.221.286	8.400.000	9.000.000	11.435.400	43.735.900	34.596.000	98,79%	89,05%	98,79%	89,05%	73,26%	25.342.433	21.433.460

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Secara umum, terdapat tren peningkatan pada nilai anggaran dan realisasi di sebagian besar program selama periode 2022 hingga 2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki nilai anggaran terbesar dibandingkan program lainnya, yaitu meningkat dari sekitar 10,65 miliar pada 2022 menjadi 14,35 miliar pada 2024. Realisasi anggarannya pun mengikuti tren serupa, dari 9,99 miliar menjadi 13,92 miliar. Rasio antara realisasi dan anggaran dalam program ini menunjukkan kecenderungan naik, yaitu dari 93,79% pada 2022 menjadi 97,05% pada 2024. Rata-rata anggaran selama tiga tahun berada pada angka sekitar 12,47 miliar, sementara rata-rata realisasi sebesar 11,93 miliar.

Program Pembinaan Perpustakaan juga mengalami kenaikan dari sisi anggaran dan realisasi tiap tahunnya. Anggaran bertambah dari sekitar 1,49 miliar pada 2022 menjadi 1,95 miliar pada 2024, sementara realisasi naik dari 1,39 miliar menjadi 1,86 miliar dalam periode yang sama. Rasio realisasi terhadap anggaran sempat turun pada 2023, namun kembali naik pada tahun berikutnya. Rata-rata anggaran program ini adalah sekitar 1,74 miliar, dengan realisasi rata-rata sebesar 1,63 miliar.

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno menunjukkan peningkatan signifikan pada anggaran di tahun 2023, dari 122 juta pada 2022 menjadi 239 juta, lalu sedikit menurun menjadi 227 juta pada 2024. Realisasi juga mengikuti pola serupa, dengan rata-rata realisasi sebesar 187 juta dan rasio realisasi yang meningkat dari 89,23% di 2022 menjadi sekitar 96% di tahun-tahun berikutnya.

Untuk Program Pengelolaan Arsip, terdapat lonjakan anggaran dari 292 juta pada 2022 menjadi 655 juta pada 2023, kemudian turun menjadi 489 juta di 2024. Realisasi anggaran juga naik pada 2023, meskipun lebih rendah dari total anggaran, lalu menurun di 2024. Rasio realisasi mengalami penurunan di 2023 dan sedikit naik kembali di tahun berikutnya. Rata-rata anggaran selama tiga tahun mencapai sekitar 479 juta, dengan realisasi rata-rata sebesar 433 juta.

Pada Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, anggaran mengalami peningkatan pada 2023 lalu menurun di 2024. Angka realisasi juga mengikuti pola yang sama, dengan nilai rata-rata anggaran sekitar 363 juta dan realisasi sekitar 326 juta. Rasio antara realisasi dan anggaran relatif stabil dalam tiga tahun terakhir.

Sementara itu, Program Perizinan Penggunaan Arsip menunjukkan perubahan cukup besar. Anggarannya meningkat tajam dari sekitar 11 juta pada 2022 menjadi 49 juta pada 2023, namun sedikit turun pada 2024. Realisasi pada 2022 dan 2023 masih mendekati angka anggaran, tetapi mengalami penurunan lebih jauh pada 2024. Rasio realisasi yang sebelumnya mencapai 98,79% turun menjadi 73,26% pada 2024. Rata-rata anggaran program ini selama tiga tahun adalah sekitar 35 juta, sementara rata-rata realisasi berada di angka 29 juta.

Dari keseluruhan data tersebut, dapat dilihat bahwa tren anggaran dan realisasi cenderung meningkat, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa program. Rasio antara realisasi dan anggaran bervariasi antar program dan tahun, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat penyerapan anggaran. Rata-rata pertumbuhan pada sebagian besar program menunjukkan nilai yang positif, dengan angka realisasi umumnya berada di bawah jumlah anggaran yang direncanakan.

C. Mitra Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam pecapaian tugas fungsi penyelenggaraan urusan kearsipa bermitra dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Semarang, hal ini berkaitan dengan kemitraan dalam pengelolaan arsip dinas dan pengembangan SDM pengelolaa arsip. Selanjutnya dalam upaya pencapaian tugas fungsi penyelenggaraan urusan kearsipan, Dinas Arsip dan Perpustakaan bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Dinas-Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dalam pengelolaan perpustakaan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan serta perpustakaan sekolah.

D. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pencapaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan di Kota Semarang tidak berkaitan langsung dengan BUMD yang ada di Kota Semarang.

E. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Arsip dan Perpustakaan

Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan perlustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang bekerjasama dengan pihak swasta atau Perangkat Daerah di tingkat nadional dan Provinsi. Kerjasama dengan pihak swasta antara lain dilakukan dalam bentuk pengembangan perpustakaan khusus, sedangkat kerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat nasional dan provinsi dilakukan dalam bentuk pelaksanaan koordinasi pengelolaan perpustakaan umum, perpustakan perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Semarang, serta koordinasi kebijakan-kebijakan terkait perpustakaan dan kearsipan.

F. Inovasi Dinas Arsip dan Perpustakaan

Salah satu inovasi yang telah di lakukan di Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah pengelolaan aplikasi arsip digital melalui Sistem Elektronik Layanan Arsip Kota Semarang (Selaras) dan pengelolaan perpustakaan digital melalui *Sibooky*.

G. Penghargaan Dinas Arsip dan Perpustakaan

Salah datu pengahargaan yang pernah di terima oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang selama 5 tahun terakhir adalah Penghargaan Memori Kolektif Bangsa Tahun 2024 dan Penghargaan Pemerintah Daerah pada Penilaian Pengawasan Kearsipan dengan Kategori Sangat Memuaskan (AA) sejak Tahun 2023.

H. Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat (P3PKM), PUG, ARG, dan KLA

Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinas Arpus) Kota Semarang seringkali dipandang sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*). Namun, dalam kerangka pemerintahan modern yang berbasis data dan pengetahuan, Dinas Arpus memiliki peran yang sangat strategis dan aktif. Melalui dua fungsi utamanya yakni pengelolaan arsip sebagai pusat data dan memori kolektif, serta pengembangan perpustakaan sebagai pusat literasi dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Arpus menjadi fondasi esensial dalam keberhasilan program-program prioritas seperti Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat (P3PKM),

Pengarusutamaan Gender (PUG), Anggaran Responsif Gender (ARG), dan perwujudan Kota Layak Anak (KLA).

1. **Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam Penyelenggaraan Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat (P3PKM)**

P3PKM adalah kerangka kerja holistik yang membutuhkan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) dan sumber daya manusia yang unggul. Dinas Arpus berkontribusi langsung pada ketiga pilar tersebut. Dalam penyelenggaran P3PKM urusan kearsipan mempunyai peran dalam menunjang Perencanaan Pemerintahan melalui

- Penyedia Data Otentik
  Arsip statis dan dinamis yang dikelola Dinas Arpus (misalnya, data kependudukan historis, data pembangunan infrastruktur, risalah rapat kebijakan) merupakan sumber data primer yang otentik. Data ini krusial bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk melakukan evaluasi program sebelumnya dan merumuskan kebijakan baru yang tepat sasaran.
- Menciptakan Akuntabilitas dan Transparansi
  Ketersediaan arsip yang terkelola dengan baik menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Jejak rekam kebijakan dan penggunaan anggaran dapat ditelusuri, mendukung prinsip good governance.
- Dasar Hukum dan Aset
  Arsip terkait aset tanah, perizinan, dan peraturan daerah menjadi bukti hukum yang melindungi aset pemerintah kota dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sedangkan peran pelaksanaan urusan perpustakaan dalam penyelenggaran P3PKM adalah menunjang Pembangunan Manusia, melalui:

- Peningkatan Indeks Literasi
  Perpustakaan adalah garda terdepan dalam meningkatkan budaya baca dan indeks literasi masyarakat, yang merupakan indikator kunci pembangunan manusia. Masyarakat yang literat lebih mampu menyerap informasi, meningkatkan keterampilan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
- Pengembangan Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat
  Perpustakaan menyediakan sumber belajar gratis dan aksesibel bagi semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lansia. Ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan formal dan non-formal.
- Peningkatan Literasi Digital
  Di era digital, perpustakaan kota berperan sebagai agen literasi digital, mengajarkan masyarakat cara mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak dan aman.

Dinas Arpus dalam penyelenggaraan P3PKM juga dapat menunjang Kesejahteraan Masyarakat melalui

- Pemberdayaan Ekonomi
  Perpustakaan dapat menjadi pusat informasi dan pelatihan keterampilan (misalnya, workshop UMKM, pelatihan digital marketing) yang membantu meningkatkan kapabilitas ekonomi warga.

- Inklusi Sosial
  Perpustakaan adalah ruang publik yang inklusif, menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi semua kelompok masyarakat untuk berinteraksi, belajar, dan berkreasi, sehingga memperkuat kohesi sosial.

2. Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

PUG bertujuan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. ARG adalah alat untuk mewujudkan PUG melalui anggaran. Dinas Arpus memiliki peran kunci dalam penyediaan data dan pemberdayaan. Secara sepesifik peran fungsi penyelenggaraan urusan kearsipan, dalam penyelenggaraan PUG dan ARG adalah

a. Penyedia Data Terpilah Gender
   Kunci utama analisis gender adalah ketersediaan data terpilah (disaggregated data) antara laki-laki dan perempuan. Dinas Arpus dapat menjadi pusat penyimpanan data historis dan statistik dari berbagai OPD yang sudah terpilah. Data ini menjadi dasar untuk:
   - Mengidentifikasi kesenjangan gender (misalnya, partisipasi perempuan dalam musrenbang, akses terhadap layanan kesehatan, dll.).
   - Merumuskan kebijakan yang responsif gender.
   - Menyusun justifikasi untuk Anggaran Responsif Gender (ARG).

b. Memori Perjuangan Gender:
   Arsip tentang peran perempuan dalam sejarah Semarang, tokoh-tokoh perempuan, dan gerakan kesetaraan gender dapat menjadi bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya PUG.

Secara sepesifik peran fungsi penyelenggaraan urusan perpustakaan, dalam penyelenggaraan PUG dan ARG adalahPeran Fungsi Perpustakaan

a. Pusat Informasi dan Literasi Gender
   Menyediakan koleksi buku, jurnal, dan materi informasi lainnya yang bertemakan kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan kepemimpinan perempuan. Mengadakan diskusi, seminar, dan bedah buku tentang isu-isu gender untuk meningkatkan pemahaman staf pemerintah dan masyarakat umum.
b. Ruang Aman dan Pemberdayaan Perempuan
   Perpustakaan dapat difungsikan sebagai "ruang ketiga" yang aman bagi perempuan untuk belajar, berjejaring, dan mengikuti pelatihan keterampilan. Menyelenggarakan program-program yang secara spesifik menyasar pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan, kelas literasi finansial, atau kelas parenting yang mendukung kesetaraan peran dalam keluarga.
c. Mendukung ARG
   Program-program pemberdayaan perempuan yang dirancang oleh perpustakaan dapat diajukan sebagai bagian dari usulan Anggaran Responsif Gender, dengan argumentasi yang didukung oleh data kebutuhan perempuan di lapangan.

3. Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA)

KLA adalah sistem pembangunan kota yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Perpustakaan, secara spesifik menjadi salah satu indikator kunci dalam gugus "Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya" dalam evaluasi KLA. Dalam penyelenggaraan KLA di Kota Semarang, urusan Kearsipan memiliki peran dan fungsi:

1. Arsip Sejarah Anak
   Mengelola dan melestarikan arsip terkait sejarah layanan anak di Kota Semarang (misalnya, pendirian sekolah, program imunisasi historis, kebijakan perlindungan anak masa lalu) sebagai bahan riset dan evaluasi jangka panjang.
2. Data Pendukung
   Menyediakan data pendukung dari berbagai OPD terkait pemenuhan hak anak dari waktu ke waktu.

Sedangkan peran fungsi urusan perpustakaan dalam penyelenggaraan KLA adalah:

1. Penyedia Ruang Bermain dan Belajar yang Ramah Anak
   Perpustakaan Umum Kota Semarang dan perpustakaan di tingkat kecamatan/kelurahan wajib menyediakan sudut baca anak yang aman, nyaman, menarik, dan edukatif.
2. Akses terhadap Bacaan Berkualitas
   Menyediakan koleksi buku anak yang beragam, berkualitas, non-diskriminatif, dan sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak.
3. Pusat Kegiatan Kreatif Anak
   Menjadi pusat kegiatan yang merangsang kreativitas dan minat baca, seperti: sesi mendongeng (storytelling), lomba bercerita, klub membaca anak, dan lokakarya seni. Menyediakan layanan internet aman dan terfilter untuk anak-anak (Pojok Internet Ramah Anak).
4. Pemenuhan Hak Anak atas Informasi
   Perpustakaan adalah instrumen utama pemerintah kota dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan informasi yang layak.
5. Dukungan untuk Orang Tua
   Mengadakan program literasi keluarga dan kelas parenting untuk membekali orang tua dengan pengetahuan tentang pengasuhan dan pentingnya membaca sejak dini.

4. Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam Penyelenggaraan Posyandu 6 SPM

Dinas Arsip dan Perpustakaan (DINARPUS) Kota Semarang, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pelayanan kesehatan teknis, memegang peranan strategis sebagai pendukung utama dalam keberhasilan penyelenggaraan Posyandu yang terintegrasi dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Peran ini diwujudkan melalui fungsi literasi, penyediaan informasi, dan pengelolaan data yang krusial bagi kader, ibu hamil, balita, dan masyarakat umum. Keenam SPM Kesehatan yang menjadi fokus adalah:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dan Lanjut Usia

Peran DINARPUS dapat diuraikan dalam beberapa kontribusi utama berikut:

1. Peningkatan Literasi dan Pengetahuan Kesehatan Masyarakat
   Peran paling fundamental DINARPUS adalah sebagai pusat sumber informasi dan literasi. Peningkatan pengetahuan ibu, keluarga, dan kader Posyandu secara langsung memengaruhi keberhasilan implementasi 6 SPM Kesehatan.
2. Penyediaan Koleksi Bahan Bacaan
   DINARPUS menyediakan buku, majalah, brosur, dan leaflet tentang kesehatan ibu dan anak (KIA), gizi seimbang, pola asuh, stunting, imunisasi, serta kesehatan reproduksi. Koleksi ini dapat diakses di perpustakaan kota, perpustakaan keliling, maupun pojok baca digital (e-perpus) yang menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.
3. Program Literasi Terapan
   Melalui kegiatan seperti storytelling (bercerita) untuk anak-anak di Posyandu, DINARPUS dapat menyisipkan pesan-pesan kesehatan dasar. Untuk para ibu, dapat diadakan sesi bedah buku atau diskusi dengan narasumber (bekerja sama dengan Dinas Kesehatan) mengenai buku-buku KIA atau panduan gizi.
4. Penyediaan Konten Digital
   DINARPUS dapat memproduksi atau menghimpun konten edukasi dalam format audio visual, seperti video pendek tentang cara menyiapkan MPASI (Makanan Pendamping ASI) yang bergizi, senam ibu hamil, atau pentingnya kebersihan diri. Konten ini bisa ditayangkan di fasilitas perpustakaan atau didistribusikan melalui media sosial dan kanal digital lainnya.
5. Pengelolaan Arsip dan Data untuk Peningkatan Kualitas Layanan
   Melalui manajemen Data dan Laporan, DINARPUS dapat memberikan pelatihan atau pendampingan kepada kader Posyandu dan petugas puskesmas mengenai tata kelola arsip dasar. Ini mencakup cara pengarsipan catatan kesehatan balita, laporan bulanan Posyandu, dan data ibu hamil. Arsip yang tertata baik akan memudahkan pelacakan, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
6. Kolaborasi Kegiatan di Ruang Publik
   DINARPUS dapat menyediakan ruang di perpustakaan untuk kegiatan Posyandu Remaja atau kelas ibu hamil. Lokasi yang netral, nyaman, dan ber-AC bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja dan ibu muda untuk berpartisipasi aktif.
7. Integrasi Layanan
   Program Perpustakaan Keliling dapat diintegrasikan dengan jadwal Posyandu di tingkat RW. Saat para ibu menunggu giliran penimbangan balita, mereka bisa membaca buku atau mendapatkan penyuluhan literasi dari pustakawan.

Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam penyelenggaraan Posyandu 6 SPM bersifat suportif namun strategis. DINARPUS berfungsi sebagai akselerator dan fasilitator dengan memastikan bahwa masyarakat dan kader Posyandu memiliki akses yang mudah terhadap informasi kesehatan yang akurat dan relevan. Melalui peningkatan literasi, penyediaan sarana pembelajaran modern, dukungan pengelolaan data, serta pemanfaatan perpustakaan sebagai ruang publik, DINARPUS secara signifikan berkontribusi pada pencapaian target keenam Standar

Pelayanan Minimal bidang kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

B. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai berikut:

C. Masih kurangnya kesadaran dalam pengelolaan arsip
D. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia kearsipan.
E. Tuntutan masyarakat untuk layanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif dalam pelayanan kearsipan kepada masyarakat.
F. Perubahan kebijakan dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu kontinuitas dan efektivitas pelayanan kearsipan.
G. Lambatnya perkembangan peningkatan minat baca masyarakat, akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya minat baca.
H. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang perpustakaan.
I. Tuntutan masyarakat untuk layanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif dalam pelayanan perpustakaan.
J. Perubahan kebijakan dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu kontinuitas dan efektivitas pelayanan perpustakaan

K. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan di Kota Semarang.
2. Pengembangan pengelolaan kearsipan melalui digitalisasi arsip sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(Good and Clean Governance*).
3. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital dalam mendorong minat baca masyarakat.
4. Adanya peningkatan layanan perpustakaan keliling yang efektif meningkatkan minat baca masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan pustaka yang *up to date*.
6. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kota Semarang.

1.5. 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Dinas Arsip dan Perpustakaan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Dinas Arsip dan Perpustakaan telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Dinas Arsip dan Perpustakaan.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Pengembangan pelayanan pemerintah daerah adalah proses yang kompleks dengan berbagai tantangan dan peluang yang harus diperhatikan dengan seksama. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain dijabarkan sebagai berikut.

Sebagaimana dalam peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 112 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Arsip dan Perpustakaan, maka dirumuskan permasalahan utama Pembangunan Jangka Menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan yaitu: “ **Belum optimalnya kualitas literasi masyarakat & tata kelola arsip daerah**” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya kualitas literasi masyarakat & tata kelola arsip daerah”

Hal ini ditujunjukkan dengan data pada tahun 2024 di mana Kota Semarang masih tertinggal dengan Kota lain di Jawa Tengah seperti Kota Salatiga (80,63), Kota Surakarta (99,85), dan Kota Magelan (100). Selain itu, tata kelola arsip daerah Kota Semarang juga masih lebih rendah daripada Kota Yogyakarta (95,38).

Tabel 2. 7 Permasalan dan Akar Permasalahan

Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum optimalnya partisipasi dan pemanfaatan perpustakaan daerah (data 2024, pemanfaatan perpustakaan daerah adalah 83,17%)	Kurangnya strategi komunikasi dan pendekatan yang efektif untuk menjangkau, melibatkan, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
	Minimnya kolaborasi dengan komunitas lokal, sekolah, dan lembaga lain yang berpotensi mendorong partisipasi masyarakat.
Belum optimalnya penyediaan akses layanan membaca secara manual dan virtual (Data 2024, Rasio Koleksi	Keterbatasan koleksi bahan pustaka yang relevan, mutakhir, dan sesuai kebutuhan

Permasalahan	Akar Permasalahan
perpustakaan daerah dibandingkan jumlah penduduk adalah 0,07 Rasio)	pengguna, baik dalam bentuk fisik maupun digital
	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas dalam mengelola dan mengembangkan layanan baca digital maupun manual secara efektif.
Belum optimalnya Sistem dan jaringan informasi kearsipan yang terintegrasi ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Keterbatasan kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip digital dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis SPBE
	Lemahnya koordinasi lintas sektor/perangkat daerah dalam pengembangan dan sinkronisasi sistem informasi kearsipan
Belum optimalnya perizinan, pelestarian dan pengembangan arsip sebagai sumber nilai budaya dan sejarah. (Data 2024, penebitan izin penggunaan arsip adalah 82,46%)	Kurangnya kemitraan strategis antara Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan dengan lembaga kebudayaan, pendidikan, serta komunitas sejarah dalam upaya pelestarian dan pengembangan arsip bernilai budaya.
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan dalam mendukung pelestarian, pengelolaan metadata, dan publikasi arsip kepada masyarakat luas sebagai sumber edukasi dan kebudayaan.
Belum optimalnya pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya dan sejarah	Minimnya program edukasi, sosialisasi, dan promosi yang sistematis untuk meningkatkan pemanfaatan manuskrip dan arsip
	Keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya dalam pelestarian, digitalisasi, dan pengelolaan manuskrip serta arsip.
Belum optimalnya pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan. (data 2024, nilai SKM adalah 91,27%)	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai terkait pelayanan internal yang efektif dan responsif.
	Belum diterapkannya sistem evaluasi dan monitoring kinerja pelayanan internal secara rutin untuk perbaikan berkelanjutan

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kurangnya strategi komunikasi dan pendekatan yang efektif untuk menjangkau, melibatkan, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Minimnya kolaborasi dengan komunitas lokal, sekolah, dan lembaga lain yang berpotensi mendorong partisipasi masyarakat.
3. Keterbatasan koleksi bahan pustaka yang relevan, mutakhir, dan sesuai kebutuhan pengguna, baik dalam bentuk fisik maupun digital
4. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas dalam mengelola dan mengembangkan layanan baca digital maupun manual secara efektif.
5. Keterbatasan kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip digital dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis SPBE

6. Lemahnya koordinasi lintas sektor/perangkat daerah dalam pengembangan dan sinkronisasi sistem informasi kearsipan
7. Kurangnya kemitraan strategis antara Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan dengan lembaga kebudayaan, pendidikan, serta komunitas sejarah dalam upaya pelestarian dan pengembangan arsip bernilai budaya.
8. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan dalam mendukung pelestarian, pengelolaan metadata, dan publikasi arsip kepada masyarakat luas sebagai sumber edukasi dan kebudayaan.
9. Minimnya program edukasi, sosialisasi, dan promosi yang sistematis untuk meningkatkan pemanfaatan manuskrip dan arsip
10. Keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya dalam pelestarian, digitalisasi, dan pengelolaan manuskrip serta arsip.
11. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai terkait pelayanan internal yang efektif dan responsif.
12. Belum diterapkannya sistem evaluasi dan monitoring kinerja pelayanan internal secara rutin untuk perbaikan berkelanjutan

2.2.2. Telaah Dokumen Lainnya

A. Telaah RPJMN 2025-2029

Dalam kerangka RPJMN 2025-2029, penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan diposisikan sebagai elemen fundamental dalam mendukung transformasi digital, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya literasi. Kedua urusan ini tidak lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata, melainkan sebagai pilar strategis untuk menjaga memori kolektif bangsa, menyediakan akses informasi yang merata, an meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam RPJMN 2025-2029, urusan kearsipan dan perpustakaan memegang peranan krusial sebagai fondasi pembangunan nasional. Kearsipan diarahkan untuk menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan digital yang transparan dan akuntabel, sementara perpustakaan ditransformasikan menjadi pusat inkubasi pengetahuan dan kreativitas masyarakat. Amanat yang terkandung di dalamnya menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi digital, penguatan tata kelola, dan peningkatan aksesibilitas layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia guna mendukung terwujudnya visi pembangunan jangka panjang negara.

Dalam penyelenggaraah urusan kearsipan amanat utama dalam bidang kearsipan adalah transformasi digital untuk memperkuat Memori Kolektif Bangsa (MKB) dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Arah kebijakan penyelenggaraan kearsipan dalam RPJMN 2025-2029 difokuskan pada:

1. Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional
   Memastikan bahwa pengelolaan arsip, baik di tingkat pusat maupun daerah, terkelola secara profesional, terstandar, dan terintegrasi.
2. Percepatan Transformasi Digital Arsip
   Mendorong digitalisasi arsip-arsip konvensional serta pengelolaan arsip elektronik (e-arsip) secara andal dan berkelanjutan untuk kemudahan akses dan preservasi jangka panjang.
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pemanfaatan Arsip

Menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang mudah diakses oleh publik untuk berbagai kepentingan, mulai dari penelitian, pendidikan, hingga pembuktian hukum.

4. Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Nasional
   Menghubungkan berbagai sistem informasi kearsipan yang ada (seperti aplikasi SIKN dan JIKN) dengan platform interconnectedness governance untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, strategi yang diamanatkan meliputi:

1. Pengembangan Big Data Kearsipan (Big Archives)
2. Membangun sebuah pusat khazanah arsip nasional dalam bentuk big data yang mengintegrasikan arsip dari berbagai lembaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan satu sumber data arsip nasional yang komprehensif.
3. Standardisasi dan Interoperabilitas
   Menetapkan standar nasional untuk pengelolaan arsip elektronik dan memastikan interoperabilitas antar sistem kearsipan di berbagai instansi.
4. Penguatan Kapasitas SDM Kearsipan
   Meningkatkan kompetensi arsiparis dan sumber daya manusia di bidang kearsipan agar mampu beradaptasi dengan teknologi digital dan tantangan pengelolaan arsip modern.
5. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Terjaga (Safeguarding Archives)
   Memberikan prioritas pada penyelamatan arsip-arsip statis bernilai sejarah tinggi serta arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat dan aset negara.
6. Pembinaan Kearsipan Terpadu
   Melakukan pembinaan dan pengawasan kearsipan secara berkelanjutan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.

Penyelenggaran urusan kearsipan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 didukung beberapa program prioritas antara lain adalah:

1. Program Transformasi Digital Kearsipan, meliputi kegiatan digitalisasi massal arsip konvensional, implementasi aplikasi umum bidang kearsipan dinamis seperti SRIKANDI secara nasional, dan pengembangan infrastruktur penyimpanan arsip digital yang aman.
2. Program Penguatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), yang bertujuan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas data pada JIKN agar informasi kearsipan dari seluruh Indonesia dapat diakses oleh publik.
3. Program Penyelamatan Arsip Memori Kolektif Bangsa, dengan fokus pada akuisisi, preservasi, dan restorasi arsip-arsip penting yang menjadi bukti perjalanan sejarah dan pembangunan bangsa.

Dalam RPJMN 2025-2029 amanat utama dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas masyarakat melalui transformasi layanan perpustakaan yang inklusif dan berbasis teknologi digital. Arah kebijakan penyelenggaraan perpustakaan dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan pada:

1. Peningkatan Budaya Literasi untuk Kesejahteraan

Menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keterampilan hidup (life skills) dan kesejahteraan.

2. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
   Mengubah paradigma perpustakaan dari sekadar tempat meminjam buku menjadi ruang publik yang kreatif, inovatif, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan disabilitas.
3. Penguatan Konten Literasi Digital Nasional
   Mendorong produksi dan penyediaan konten-konten digital yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan lokal, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
4. Modernisasi dan Integrasi Layanan Perpustakaan
   Mengembangkan layanan perpustakaan digital yang terintegrasi secara nasional (seperti platform iPusnas) dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi di perpustakaan seluruh Indonesia.

Selanjutnya, dalam RPJMN 2025-2029 strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah:

1. Pengembangan Perpustakaan sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat
   Mendorong perpustakaan di daerah (provinsi, kabupaten/kota, hingga desa) untuk merancang program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan komunitas lokal, seperti pelatihan wirausaha, lokakarya keterampilan digital, dan kegiatan literasi lainnya.
2. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana
3. Melakukan modernisasi gedung perpustakaan, penyediaan fasilitas yang ramah anak dan disabilitas, serta peningkatan konektivitas internet di perpustakaan umum.
4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Koleksi
   Menambah koleksi bahan perpustakaan, baik tercetak maupun digital, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, termasuk penguatan konten lokal.
5. Peningkatan Kompetensi Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan
   Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi para pustakawan agar mampu memberikan layanan yang inovatif dan relevan dengan era digital.
6. Penguatan Sinergi Lintas Sektor
   Membangun kemitraan dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta untuk menggalakkan gerakan literasi nasional.

Penyelenggaran urusan perpustakaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 didukung beberapa program prioritas antara lain adalah

1. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yakni program nasional yang bertujuan untuk mereplikasi dan memperluas jangkauan perpustakaan yang memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kabupaten/kota.
2. Program Peningkatan Indeks Literasi Masyaraka, meliputi kegiatan promosi gemar membaca, festival literasi, serta penyediaan bahan bacaan bermutu hingga ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

3. Program Digitalisasi Konten dan Naskah Kuno Nusantara, merupakan upaya untuk melestarikan kekayaan intelektual bangsa dalam bentuk digital dan membuatnya dapat diakses secara global melalui repositori nasional.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi dan misi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"**KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF**"

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi "Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif", selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Berdasarkan misi dalam RPJMD, dalam rangka penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang mendukung tercapaianya Misi ke-1 *Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian* yang secara khusus erat kaitannya dengan litersi masyarakat, dan Misi ke 7 *Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas,* yang secara khusus erat kaitannya dengan penyelenggaran pengelolaan kearsipan Kota Semarang dan pelayanan perpustakaan.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 terdapat beberapa tujuan dan pembangunan yang meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing, didukung dengan sasaran:
    1) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, melalui indikator LPE Sektor Perdagangan dan Jasa
    2) Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, melalui PMTB terhadap PDRB.
    3) Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa, melalui indikator tingkat inflasi
2. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang
   didukung dengan sasaran:
    a. Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan, melalui indikator tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah.
    b. Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis, melalui indikator tingkat pengembangan kawasan strategis

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian, didukung dengan sasaran:
    a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan, diukur melalui Indeks Kesehatan.
    b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata, diukur melalui Indeks Pendidikan.
    c. Meningkatnya kesetaraan gender, melalui Indeks Pembangunan Gender.
4. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif, didukung dengan sasaran:
    a. Meningkatnya kualitas demokrasi politik, melalui indikator indeks demokrasi Indonesia.
    b. Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan, melalui angka kriminalitas.
5. Menurunnya kemiskinan secara inklusif, didukung dengan sasaran:
    a. Menurunnya beban pengeluaran masyarakat, melalui Persentase
    masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya .
    b. Meningkatnya pendapatan masyarakat , melalui PDRB per kapita.
    c. Meningkatnya akses lapangan kerja, melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
6. Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat, didukung dengan sasaran:
    a. Menurunnya dampak perubahan iklim, melalui indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Indek Kualitas Lingkungan Hidup.
    b. Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan, melalui indikator Indeks risiko bencana.
    c. Menurunnya kawasan banjir dan rob, melalui indikator persentase kawasan banjir dan rob.
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat, didukung dengan sasaran:
    d. Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional.
    e. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.
    f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan, strategi untuk mencapai sasaran RPJMD yang berkaitan dengan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dirumuskan sebagai berikut.

Roadmap Zona Aktivitas Gratis Untuk Masyarakat

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota menyatakan komitmennya untuk mendukung secara aktif tercapainya Visi dan Misi Wali Kota serta sasaran strategis dalam RPJMD Kota 2025–2029. Salah satu bentuk dukungan nyata

diberikan melalui partisipasi dalam *Roadmap Zona Aktivitas Gratis untuk Masyarakat*, sebuah inisiatif yang mendorong terciptanya ruang-ruang publik yang inklusif, edukatif, dan bebas biaya bagi seluruh warga.

Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan menyediakan Layanan Perpustakaan Keliling yang menjangkau berbagai titik lokasi strategis di wilayah Kota. Layanan ini bertujuan untuk:

- Mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan bermutu tanpa biaya;
- Menumbuhkan minat baca di kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa;
- Mendorong pemerataan literasi di wilayah yang belum terjangkau layanan perpustakaan konvensional;
- Mendukung pembangunan SDM unggul melalui pendekatan literasi inklusif dan berbasis komunitas.

Dengan mobilitas tinggi dan jadwal layanan yang terjadwal secara rutin, Perpustakaan Keliling hadir langsung di tengah masyarakat—seperti di taman kota, alun-alun, sekolah, dan kawasan pemukiman—sehingga sejalan dengan semangat *Zona Aktivitas Gratis* yang memprioritaskan kemudahan akses, pemerataan layanan, dan peningkatan kualitas hidup warga.

Melalui upaya ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan tidak hanya menjalankan fungsi literasi, tetapi juga mengambil peran aktif dalam pembangunan kota yang berwawasan inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

C. Telaahan Restra Kementerian/Lembaga di tingkat Nasional

1. Telaahan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***", menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, ANRI merumuskan misi sebagai berikut:

1. memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundangundanganan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia, maka tujuan pembangunan tahun 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu: ***"Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indicator Indeks Pemanfaatan Arsip"***.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Arsip Nasional Republik Indonesia dalam periode 2020 – 2024 yaitu :

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan.
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan.

Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi

2. Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Dalam dokumen Rencana Strategis Perpustakaan NasionalbTahun 2020- 2024 telah ditetapkan visi yaitu : "***Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi***". Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh)bAgenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Perpustakaan Nasional telah merumuskan misi yaitu : "***Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara***".

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Perpustakaan Nasional, maka tujuan pembangunan tahun 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu: "***Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024***".

Sasaran strategis yang ingin dicapai Perpustakaan Nasional dalam periode 2020-2024 adalah : "Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca", dengan indikator :

1. Nilai kegemaran membaca dari 53,84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.

Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024

D. Telaahan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip
2. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Permasalahan Pelayanan Dinas Arsip dan Kota Semarang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk tertib arsip	Belum terwujudnya implementasi tertib arsip yang terintegrasi	Belum terdapatnya sistem kearsipan terintegrasi	Sedang dibangun pengelolaan kearsipan berbasis Teknologi Informasi
2	Meningkatnya kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat untuk kesejahteraan	Rendahnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	Pengembangan perpustakaan harus menyesuaikan tuntutan masyarakat	Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayahnya

E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Arsip dan Perpustakaan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang **tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang.**

F. Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah.Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

Berdasarkan perumusan KLHS untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang tidak berkaitan secara langsung dengan dokumen KLHS. Namun jika ditelaah lebih dalam berdasarkan KLHS isu yang cenderung terkait dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah isu **Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab** dengan masalah strategis yakni belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Tabel 2. 9 Tema Isu KLHS terhadap Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Perlunya memperkuat tatakelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab	1. belum optimalnyapenerimaan pemerintah, belum optimalnya penegakan hukum dan perlindungan masyara
	2. belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
	3. belum optimalnya pelayanan aksesibilitas internet

2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

   Masih terdapat kesenjangan antara kondisi aktual pengelolaan perpustakaan dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan (SNP), baik pada tingkat perpustakaan umum, sekolah, hingga kelurahan. Hal ini dapat menghambat akreditasi perpustakaan, menurunkan minat baca masyarakat, dan berdampak pada nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

2. Pengembangan dan penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir

   Koleksi buku di banyak perpustakaan, khususnya di tingkat kelurahan dan sekolah, masih kurang relevan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan literasi digital. Buku-buku yang tersedia cenderung bersifat usang atau tidak sesuai dengan minat pembaca saat ini. Kurangnya koleksi yang menarik dan relevan dapat mengurangi frekuensi kunjungan dan menurunkan minat baca masyarakat, khususnya generasi muda yang cenderung mengakses konten digital.

3. Pengintegrasian sistem kearsipan pemerintahan secara digital dan pengembangan Big Data Kearsipan

   Transformasi digital kearsipan di Kota Semarang telah berjalan, namun belum sepenuhnya terintegrasi antar-OPD. Implementasi aplikasi SRIKANDI sebagai platform kearsipan digital nasional masih mengalami tantangan teknis dan kesiapan SDM. Dokumen penting berisiko tidak terdokumentasi dengan baik, menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta mengurangi efisiensi pelayanan publik.

Tabel 2.10 Kesimpulan Isu Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mulai dibangunnya Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	Rendahnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab	Urbanisasi Dunia	Krisis Lingkungan	Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
						Pengembangan dan penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir
ndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Belum terwujudnya implementasi tertib arsip yang terintegrasi		Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	pengintegrasian sistem kearsipan pemerintahan secara digital dan pengembangan Big Data Kearsipan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBAJIKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Arsip dan Perpustakaan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kkota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal “Peningkatan Kualitas Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Arsip Daerah”.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah “pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota”. Adapun visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah “Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”, dimana hal ini dicapai melalui pembangunan Kota Semarang agar menjadi semakin hebat.

Dari pokok-pokok pikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu upaya Peningkatan Kualitas Literasi Masyarakat dan Tata

Kelola Arsip Daerah, agar dapat **terwujud kualitas literasi masyarakat dan tata kelola arsip daerah yang berkualitas**, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, yang **dicapai melalui pembangunan Kota Semarang agar menjadi semakin hebat**.

Dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu:

“ Meningkatnya kualitas literasi masyarakat & tata kelola arsip daerah”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, yaitu “**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Pengawasan Kearsipan**”. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, dimana Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi pelayanan wajib non-dasar urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Arsip dan Perpustakaan maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Meningkatnya Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis**

   Dengan indikator sasaran yaitu “**Persentase Peningkatan Ketersediaan Arsip**”. Indikator ini diukur dari persentase capaian Efisiensi Pengelolaan Arsip, Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup, dan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK.
2. **Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat**.

   Dengan indikator sasaran yaitu “**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**”. Indikator ini diukur menggunakan metode survey dengan pengukuran dimensi utama Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca.
3. **Meningkatnya Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan**

   Dengan indikator sasaran yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Arsip dan Perpustakaan & Nilai AKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan”. Indikator ini diukur dari hasil penilaian terhadap AKIP (Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja. Serta Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yang diambil dari Bagian Organisasi Kota Semarang.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025-2029.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	**Meningkatnya kualitas literasi masyarakat & Tata Kelola Arsip Daerah**		**Indeks pembangunan literasi masyarakat**	Angka	71.58	73	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	IKU
		Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	69,59	70	71	72	73	74	75	IKU
		Meningkatnya kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan	Angka	73,40	74.25	75,1	76.5	77	77.5	78	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Arsip dan Perpustakaan	Nilai	91,27	91.5	92	92.5	93	93.5	94	
Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	**Meningkatnya kualitas literasi masyarakat & Tata Kelola Arsip Daerah**		**Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah**	Angka	91	94.43	94.44	94.45	94.46	94.47	94.48	IKU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip	Angka	80,76	83	84	85	86	87	88	IKU

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Arsip dan Perpustakaan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Tahapan Startegi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan kapasistas, dan sistem manajemen pengelolaan arsip dan pelayanan perpustakaan berbasis digital	Peningkatan kapasistas, sistem manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan arsip dan pelayanan perpustakaan di Kota Semarang	Penguatan kapasistas, sistem manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan arsip dan pelayanan perpustakaan di Kota Semarang	Akselerasi kapasistas, sistem manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan arsip dan pelayanan perpustakaan di Kota Semarang	Perwujudan efektivitas manajemen pengelolaan arsip dan pelayanan perpustakaan di Kota Semarang

3.2.2. Kebijakan perangkat Daerah

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	Penguatan komunikasi dan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan lokal	Urusan Perpustakaan
			Peningkatan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan komunitas lokal, satuan pendidikan, dan lembaga terkait	
			Penguatan pengelolaan koleksi bahan pustaka yang berorientasi pada kebutuhan pengguna melalui pengadaan yang selektif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi informasi.	
			Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan dalam pengelolaan layanan baca manual dan digital yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.	
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keahlian dalam pengelolaan arsip digital serta penerapan teknologi informasi sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Urusan Kearsipan
			Penguatan koordinasi dan sinergi antar sektor serta perangkat daerah dalam pengembangan dan integrasi sistem informasi kearsipan	
			Pengembangan kemitraan strategis yang berkelanjutan dengan lembaga kebudayaan, pendidikan, dan komunitas sejarah	
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip melalui digitalisasi, pengelolaan metadata yang sistematis, serta publikasi arsip secara luas.	
			Penguatan edukasi, sosialisasi, dan promosi yang terstruktur dan berkelanjutan	
			Peningkatan kapasitas teknis dan pemenuhan sumber daya yang kompeten dan memadai	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

a. Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
   1) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah
   2) Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
   4) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
   5) Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
   6) Sub Kegiatan Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
   7) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   8) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
   9) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
   10) Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
   11) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

b. Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
   1) Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
   3) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   4) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
   5) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat

2. Program Perizinan Penggunaan Arsip

a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

2) Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

3. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

a. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
   2) Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

c. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
   1) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah
   4) Sub Kegiatan Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan

d. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
   2) Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

e. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
   1) Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang
   2) Sub Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
   3) Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

4. Program Pengelolaan Arsip

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
   1) Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
   3) Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis
   5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
   6) Sub Kegiatan Penyusunan Database Arsiparis
   7) Sub Kegiatan Pemilihan Arsiparis Teladan

8) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
9) Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan
10) Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
2) Sub Kegiatan Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip
3) Sub Kegiatan Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis
4) Sub Kegiatan Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan

c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

a. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan
2) Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh

b. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5) Sub Kegiata Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
7) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kota Semarang

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal.	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan publik dasar yang inklusif, gratis, dan mudah dijangkau bagi seluruh warga masyarakat dari tahap kehidupan prenatal (dalam kandungan) hingga akhir hayat (kematian).	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam membentuk masyarakat yang literat sejak usia dini sebagai pondasi pembangunan manusia yang unggul dan inklusif. Melalui sosialisasi budaya baca di satuan pendidikan dasar dan masyarakat umum, layanan ini menyasar anak-anak, orang tua, dan komunitas literasi dengan pendekatan edukatif dan partisipatif.

Kegiatan ini diselenggarakan secara gratis dan terbuka, sehingga sejalan dengan prinsip layanan publik yang mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan dan daerah pinggiran. Literasi dasar yang kuat akan berdampak pada kualitas hidup jangka panjang, seperti kemampuan memahami informasi kesehatan ibu dan anak, pendidikan keluarga, literasi keuangan, hingga akses terhadap layanan sosial lainnya.

Dengan demikian, kegiatan ini mendukung siklus layanan publik dari masa prenatal (melalui edukasi orang tua) hingga masa kanak-kanak dan dewasa, bahkan berdampak pada generasi berikutnya. Literasi adalah prasyarat untuk memanfaatkan hak-hak dasar sebagai warga negara, sehingga kegiatan ini memiliki peran penting dalam memperkuat pilar hak sosial dan pendidikan dalam program prioritas layanan publik dari lahir hingga meninggal dunia.

Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan *output* kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. *Outcome* program serta *output* kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator *outcome* program serta indikator *output* kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta

disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator *output* kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *outcome* program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program serta *output* kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH							
- Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat & Tata Kelola Arsip Daerah				Indeks pembangunan literasi masyarakat		Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
					Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah		Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat			Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat		Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Nilai akreditasi perpustakaan daerah kota Semarang	Nilai Akreditasi Perpustakaan Daerah Kota Semarang	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Layanan Perpustakaan
				Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Staff Subkoordinator Layanan Perpustakaan
				Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Staff Subkoordinator Layanan Perpustakaan
				Terlaksanaya pemanfaatan koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang digunakan oleh masyarakat tingkat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Staff Subkoordinator Layanan Perpustakaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				daerah kabupaten/kota			
				Terlaksananya Kerjasama peningkatan kegemaran membaca dan literasi tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Staff Subkoordinator Layanan Perpustakaan
				Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	Persentase Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan
				Terlaksananya pembinaan perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Staff Subkoordinator Pembinaan perpustakaan
				Terlaksananya pembinaan perpsutakaan umum dan khusus sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Staff Subkoordinator Pembinaan perpustakaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				standar nasional perpustakaan			
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitasnya dan sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan pustakawan Tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Staff Subkoordinator Pembinaan perpustakaan
				Terlaksananya penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Staff Subkoordinator Pembinaan perpustakaan
				Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Pemberdayaan dan Jejaring perpustakaan
				Terlaksananya pemilihan duta baca/bunda baca/bunda literasi Tingkat	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Staff subkoordinator pemberdayaan dan jejaring perpustakaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				daerah kabupaten/kota			
				Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Staff subkoordinator pemberdayaan dan jejaring perpustakaan
				Terlaksananya Pembangunan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Staff subkoordinator pemberdayaan dan jejaring perpustakaan
				Terlaksananya pemberian Gerakan budaya gemar membaca Tingkat kabupaten/kota secara tepat sasaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Staff subkoordinator pemberdayaan dan jejaring perpustakaan
				Meningkatnya keterlibatan satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan khusus dalam sosialisasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Staff subkoordinator pemberdayaan dan jejaring perpustakaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				budaya baca dan literasi			
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
				Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Pemeliharaan, preservasi dan konservasi
				Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Staff subkoordinator pemeliharaan, preservasi dan konservasi
				Terlaksananya Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestaikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Staff subkoordinator pemeliharaan, preservasi dan konservasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terawatnya koleksi budaya etnis nusantara	Persentase Terawatnya koleksi budaya etnis nusantara	2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Akuisisi dan Deposit
				Terlaksananya seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Staff subkoordinator akuisisi dan deposit
				Terlaksananya pengolahan dna penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Staff subkoordinator akuisisi dan deposit
			Meningkatnya layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat		Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
				Meningkatnya layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	Persentase layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator otomasi dan pengolahan bahan perpustakaan
				Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan layanan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan	Staff subkoordinator otomasi dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Perpustakaan elektronik		Perpustakaan Elektronik	pengolahan bahan perpustakaan
				Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Akuisisi dan Deposit
				Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Staff subkoordinator akuisisi dan deposit
				Terlaksananya pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah Tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Staff subkoordinator akuisisi dan deposit
		Meningkatnya kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
					Indeks Kepuasan Masyarakat		Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris Dinas Arsi pdan Perpustakaan
					Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris Dinas Arsi pdan Perpustakaan
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan**	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Subkoordinator perencanaan dan evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staff Subkoordinator perencanaan dan evaluasi
				Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staff Subkoordinator perencanaan dan evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				dokumen RKA-SKPD			
				Tersedianya Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staff Subkoordinator perencanaan dan evaluasi
				Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.23.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staff Subkoordinator perencanaan dan evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.23.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Staff Subkoordinator perencanaan dan evaluasi
				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Staff Subkoordinator perencanaan dan evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staff Subkoordinator perencanaan dan evaluasi
				Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.23.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staff Subkoordinator perencanaan dan evaluasi
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan**	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Subbagian keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staff Subbagian keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staff Subbagian keuangan dan Barang Milik Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staff Subbagian keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staff Subbagian keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.23.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staff Subbagian keuangan dan Barang Milik Daerah
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**Nilai layanan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan**	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Dinas Arsip dan Perpustakaan			
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan**	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan	Staff Subbagian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Perlengkapan Kantor		dan Perlengkapan Kantor	Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.23.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.23.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.23.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.23.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan**	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.23.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.23.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka	2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang selesai ditindaklanjuti**	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan sesuai ketentuan**	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis			Tingkat Ketersediaan Arsip		Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Meningkatnya ketersediaan arsip		Tingkat ketersediaan arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
				Meningkatnya OPD yang telah	Persentase OPD yang telah dilaksanakan audit kearsipan	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip	Kepala Subkoordinator

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				dilaksanakan audit kearsipan		Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kearsipan
				Terlaksananya pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Staff Subkoordinator Pengawasan Kearsipan
				Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	2.24.02.2.01.0005 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Staff Subkoordinator Pengawasan Kearsipan
				Terlaksananya Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	2.24.02.2.01.0009 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Staff Subkoordinator Pengawasan Kearsipan
				Meningkatnya perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	Persentase perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Terlaksananya Penyusunan data dan infomrasi arsiparis	Jumlah arsiparis	2.24.02.2.01.0006 - Penyusunan Database Arsiparis	Staff subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pemlihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	2.24.02.2.01.0007 - Pemilihan Arsiparis Teladan	Staff subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan sadar tertib arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	2.24.02.2.01.0008 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Staff subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Terlaksananya implementasi pengelolaan arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Staff subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Meningkatnya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Terkelolanya pengumpulan dan penyampaian Salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	2.24.02.2.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Staff subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Meningkatnya jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Kepala Subkoordinator Pengembanga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Tingkat Kabupaten/Kota	n dan Sistem Informasi
				Tersdianya informasi, akses dan layanan kearsipan Tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Staff Subkoordinator Pengembangan dan Sistem Informasi
				Terlaksananya pemberdayaan kapasitas unit kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Staff Subkoordinator Pengembangan dan Sistem Informasi
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip		Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
				Meningkatnya kesesuain kegiatan Pemusnahan arsip	Tingkat kesesuain kegiatan Pemusnahan arsip	2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kepala Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis
				Terlaksananya pemusnahan arsip yang memiliki	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	Staff Subkoordinator Pengelolaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				retensi di bawah 10 tahun		yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Arsip Dinamis
				Tersusunya daftar penilaian, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis
				Meningkatnya kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana	2.24.03.2.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
				Terlaksananya evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2.24.03.2.02.0001 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Staff Subkoordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
				Terlaksananya pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2.24.03.2.02.0002 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Staff Subkoordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
				Meningkatnya arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	Persentase arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kepala Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya penilaian dan penetapan Autentisitas Arsip statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	2.24.03.2.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
				Terlaksananya evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	2.24.03.2.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
				Terlaksananya penetapan dan pengumuman Daftar Pencairan Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup		Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
				Meningkatnya usulan pengajuan pengguna an arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
				Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Staff Subkoordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Staff Subkoordinator Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
			Meningkatnya kesesuaian pengelolaan arsip		Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
				Meningkatnya arsip dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase arsip Dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis
				Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis
				Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis
				Meningkatnya Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	Persentase Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	2.24.02.2.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
				Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
				Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	2.24.02.2.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
				Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
				Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	2.24.02.2.02.0005 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Staff Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
			Meningkatnya penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi		Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi		dan Pengawasan Kearsipan
				Meningkatnya arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	Presentase arsip yang terselamat kan dari OPD yang digabung/dibubarkan	2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kepala Subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Staff Subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Staff Subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Daerah Kabupaten/Kota			
				Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	2.24.03.2.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Staff Subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Staff Subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Meningkatnya autentikasi dan alih media arsip statis	Persentase autentikasi dan aliih media arsip statis	2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kepala Subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Staff Subkoordinator Pembinaan dan Kerjasama Kearsipan
				Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan	Staff Subkoordinator Pembinaan dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Penjaminan Keabsahan Arsip		Penjaminan Keabsahan Arsip	Kerjasama Kearsipan

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				15.622.241.936		17.381.974.953		18.147.892.672		18.288.580.873		18.620.435.205		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.183.162.238		15.790.646.918		16.490.299.075		16.618.815.234		16.921.958.239		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan (%)	100	100	14.183.162.238	100	15.790.646.918	100	16.490.299.075	100	16.618.815.234	100	16.921.958.239	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas (%)	100	100		100		100		100		100			
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				137.363.600		141.731.780		146.318.371		140.760.322		147.724.182		
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tersedianya acuan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Arsip dan**	100	100	137.363.600	100	141.731.780	100	146.318.371	100	140.760.322	100	147.724.182		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan**													
2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				59.064.000		62.017.200		65.118.060		48.000.000		54.963.860		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	59.064.000	2	62.017.200	2	65.118.060	2	48.000.000	2	54.963.860		
2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.908.600		5.154.030		5.411.732		7.682.318		7.682.318		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	4.908.600	2	5.154.030	2	5.411.732	2	7.682.318	2	7.682.318		
2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.723.000		4.959.150		5.207.108		7.467.462		7.467.462		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	1	4.723.000	1	4.959.150	1	5.207.108	1	7.467.462	1	7.467.462		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
2.23.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.744.000		4.981.200		5.230.260		7.491.773		7.491.773		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	4.744.000	1	4.981.200	1	5.230.260	1	7.491.773	1	7.491.773		
2.23.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				4.754.000		4.991.700		5.241.285		7.503.349		7.503.349		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	4.754.000	1	4.991.700	1	5.241.285	1	7.503.349	1	7.503.349		
2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.713.000		4.948.650		5.196.083		7.455.886		7.455.886		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	2	4.713.000	2	4.948.650	2	5.196.083	2	7.455.886	2	7.455.886		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.457.000		4.679.850		4.913.843		7.159.534		7.159.534		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	4.457.000	2	4.679.850	2	4.913.843	2	7.159.534	2	7.159.534		
2.23.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		48.000.000		48.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000		
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.723.576.333		12.318.958.980		12.922.131.849		13.555.842.591		14.221.259.040		
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan**	100	100	11.723.576.333	100	12.318.958.980	100	12.922.131.849	100	13.555.842.591	100	14.221.259.040		
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.488.568.933		12.062.977.380		12.666.147.249		13.299.454.611		13.964.427.342		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	82	11.488.568.933	87	12.062.977.380	92	12.666.147.249	97	13.299.454.611	97	13.964.427.342		
2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				231.310.800		251.950.800		251.950.800		251.950.800		251.950.800		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	231.310.800	12	251.950.800	12	251.950.800	12	251.950.800	12	251.950.800		
2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.231.400		1.342.800		1.343.800		1.478.180		1.625.998		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.231.400	1	1.342.800	1	1.343.800	1	1.478.180	1	1.625.998		
2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.457.600		1.569.000		1.570.000		1.727.000		1.899.700		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	4	4	1.457.600	4	1.569.000	4	1.570.000	4	1.727.000	4	1.899.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)													
2.23.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.007.600		1.119.000		1.120.000		1.232.000		1.355.200		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.007.600	1	1.119.000	1	1.120.000	1	1.232.000	1	1.355.200		
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23.000.000		40.000.000		40.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	**Nilai layanan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan**	0	100	23.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		
2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.000.000		5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		35.000.000		35.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	77	20.000.000	78	35.000.000	79	35.000.000	80	20.000.000	81	20.000.000		
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				457.324.774		678.242.341		712.154.458		668.388.089		329.150.784		
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan**	0	100	457.324.774	100	678.242.341	100	712.154.458	100	668.388.089	100	329.150.784		
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.623.513		20.504.689		21.529.923		21.529.923		22.562.892		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	17.623.513	4	20.504.689	4	21.529.923	4	21.529.923	4	22.562.892		
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		20.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5	7.000.000	5	20.000.000	5	21.000.000	5	21.000.000	5	21.000.000		
2.23.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.850.029		12.342.530		12.959.657		12.959.657		15.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	11	9.850.029	11	12.342.530	11	12.959.657	11	12.959.657	11	15.000.000		
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.653.165		45.218.482		47.479.406		47.479.406		40.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5	40.653.165	5	45.218.482	5	47.479.406	5	47.479.406	5	40.000.000		
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.820.817		13.361.858		14.029.951		14.029.951		15.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5	10.820.817	5	13.361.858	5	14.029.951	5	14.029.951	5	15.000.000		
2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.836.000		13.377.800		14.046.690		14.046.690		19.264.032		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	10.836.000	4	13.377.800	4	14.046.690	4	14.046.690	4	19.264.032		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.541.250		29.818.313		31.309.229		31.309.229		30.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	25.541.250	12	29.818.313	12	31.309.229	12	31.309.229	12	30.000.000		
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		167.118.669		175.474.602		175.474.602		100.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	130.000.000	12	167.118.669	12	175.474.602	12	175.474.602	12	100.000.000		
2.23.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		6.500.000		6.825.000		8.190.000		9.360.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	12	5.000.000	12	6.500.000	12	6.825.000	12	8.190.000	12	9.360.000		
2.23.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000		350.000.000		367.500.000		322.368.631		56.963.860		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	10	200.000.000	10	350.000.000	10	367.500.000	10	322.368.631	10	56.963.860		
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah				100.000.000		635.000.000		400.000.000		100.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan**	0	100	100.000.000	100	635.000.000	100	400.000.000	100	100.000.000	100	10.000.000		
2.23.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		55.000.000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.23.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		400.000.000		300.000.000		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	400.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0		
2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		80.000.000		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		10.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	10.000.000		
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				884.350.251		1.154.270.726		1.250.535.547		1.250.535.547		1.250.535.547		
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang selesai ditindaklanjuti**	100	100	884.350.251	100	1.154.270.726	100	1.250.535.547	100	1.250.535.547	100	1.250.535.547		
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				281.671.506		481.324.106		577.588.927		577.588.927		577.588.927		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	281.671.506	12	481.324.106	12	577.588.927	12	577.588.927	12	577.588.927		
2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa				602.678.745		672.946.620		672.946.620		672.946.620		672.946.620		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	602.678.745	12	672.946.620	12	672.946.620	12	672.946.620	12	672.946.620		
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				857.547.280		822.443.091		1.019.158.850		873.288.685		933.288.686		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan sesuai ketentuan**	100	100	857.547.280	100	822.443.091	100	1.019.158.850	100	873.288.685	100	933.288.686		
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.583.783		43.662.972		52.395.567		62.874.680		62.874.680		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	41.583.783	1	43.662.972	1	52.395.567	1	62.874.680	1	62.874.680		
2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				570.963.497		599.511.672		719.414.006		719.414.006		719.414.006		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	27	570.963.497	28	599.511.672	29	719.414.006	30	719.414.006	31	719.414.006		
2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		159.268.448		191.122.138		90.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	150.000.000	12	159.268.448	12	191.122.138	12	90.000.000	12	150.000.000		
2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.000.000		19.999.999		56.227.139		999.999		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	95.000.000	1	19.999.999	1	56.227.139	1	999.999	1	1.000.000		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.238.492.897		1.369.520.027		1.426.549.133		1.437.024.569		1.461.733.954		
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (Angka)	84	84,83	733.672.540	85,67	807.039.794	86,5	841.569.692	87,33	869.989.829	88,05	899.494.348	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS ARSIP DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
													PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				655.612.887		728.352.016		759.734.401		743.537.248		740.507.140		
Meningkatnya Nilai akreditasi perpustakaan daerah kota Semarang	Nilai Akreditasi Perpustakaan Daerah Kota Semarang	90,64	92	54.779.940	93	60.257.934	94	64.916.557	95	65.565.721	96	66.221.379		
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				24.477.400		26.925.140		28.002.146		28.282.167		28.564.989		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	5	14	24.477.400	15	26.925.140	16	28.002.146	17	28.282.167	18	28.564.989		
2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				25.000.000		27.500.000		28.600.000		28.886.000		29.174.860		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah	5	2	25.000.000	2	27.500.000	2	28.600.000	2	28.886.000	2	29.174.860		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)													
2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				2.651.270		2.916.397		3.033.053		3.063.383		3.094.017		
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	0	1.000	2.651.270	1.200	2.916.397	1.300	3.033.053	1.400	3.063.383	1.500	3.094.017		
2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi				2.651.270		2.916.397		5.281.358		5.334.171		5.387.513		
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	0	1	2.651.270	2	2.916.397	3	5.281.358	4	5.334.171	5	5.387.513		
Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	Persentase Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	0	100	54.779.940	100	60.257.934	100	64.916.557	100	65.565.721	100	66.221.379		
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan				41.580.590		45.738.649		47.568.195		48.043.877		48.524.316		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Standar Nasional Perpustakaan														
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	5	45	41.580.590	50	45.738.649	55	47.568.195	60	48.043.877	65	48.524.316		
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				25.000.000		27.500.000		28.600.000		28.886.000		29.174.860		
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	5	35	25.000.000	35	27.500.000	35	28.600.000	35	28.886.000	35	29.174.860		
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		5.500.000		5.720.000		5.777.200		5.834.972		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi	2	2	5.000.000	2	5.500.000	2	5.720.000	2	5.777.200	2	5.834.972		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)													
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				24.432.000		26.875.200		27.950.208		28.229.710		28.512.007		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2	2	24.432.000	2	26.875.200	2	27.950.208	2	28.229.710	2	28.512.007		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				582.880.010		641.168.011		666.814.732		693.487.321		721.226.814		
Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkat kan minat membaca masyarakat	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkat kan minat membaca masyarakat	0	100	582.880.010	100	641.168.011	100	666.814.732	100	693.487.321	100	721.226.814		
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				49.755.820		54.731.402		56.920.658		59.197.484		61.565.384		
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	2	2	49.755.820	2	54.731.402	2	56.920.658	2	59.197.484	2	61.565.384		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)													
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				24.097.200		26.506.920		27.567.197		28.669.885		29.816.680		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	5	15	24.097.200	20	26.506.920	25	27.567.197	30	28.669.885	35	29.816.680		
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				420.292.554		462.321.809		480.814.682		500.047.269		520.049.160		
Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	5	15	420.292.554	20	462.321.809	25	480.814.682	30	500.047.269	35	520.049.160		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				11.567.736		12.724.510		13.233.490		13.762.830		14.313.343		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya	5	3	11.567.736	3	12.724.510	3	13.233.490	3	13.762.830	3	14.313.343		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)													
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				77.166.700		84.883.370		88.278.705		91.809.853		95.482.247		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	15	2	77.166.700	2	84.883.370	2	88.278.705	2	91.809.853	2	95.482.247		
Meningkatnya layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang (Rasio)	0,07	0,07	504.820.357	0,07	562.480.233	0,07	584.979.441	0,07	567.034.740	0,07	562.239.606		
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				655.612.887		728.352.016		759.734.401		743.537.248		740.507.140		
Meningkatnya layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	Persentase layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	0	100	249.450.797	100	274.395.877	100	285.371.711	100	288.225.429	100	291.107.682		
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				249.450.797		274.395.877		285.371.711		288.225.429		291.107.682		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	3	3	249.450.797	3	274.395.877	3	285.371.711	3	288.225.429	3	291.107.682		
Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	0	100	255.369.560	100	288.084.356	100	299.607.730	100	278.809.311	100	271.131.924		
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				129.911.920		142.903.112		148.619.236		150.105.429		151.606.483		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	200	200	129.911.920	200	142.903.112	200	148.619.236	200	150.105.429	200	151.606.483		
2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				125.457.640		145.181.244		150.988.494		128.703.882		119.525.441		
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	88	175	125.457.640	200	145.181.244	225	150.988.494	250	128.703.882	275	119.525.441		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN				200.586.801		221.808.008		231.044.464		232.741.070		236.743.012		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO														
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan (%)	100	100	200.586.801	100	221.808.008	100	231.044.464	100	232.741.070	100	236.743.012	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				67.668.133		74.827.100		77.943.000		78.515.400		79.865.500		
Meningkatnya perawatan koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	0	100	67.668.133	100	74.827.100	100	77.943.000	100	78.515.400	100	79.865.500		
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				30.171.800		33.363.800		34.753.100		35.008.300		35.610.300		
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2	2	30.171.800	2	33.363.800	2	34.753.100	2	35.008.300	2	35.610.300		
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk				37.496.333		41.463.300		43.189.900		43.507.100		44.255.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Dilestarikan dan Didayagunakan														
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2	2	37.496.333	2	41.463.300	2	43.189.900	2	43.507.100	2	44.255.200		
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				132.918.668		146.980.908		153.101.464		154.225.670		156.877.512		
Meningkatnya perawatan koleksi budaya etnis nusantara	Persentase Terawatnya koleksi budaya etnis nusantara	0	100	132.918.668	100	146.980.908	100	153.101.464	100	154.225.670	100	156.877.512		
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				126.560.738		139.987.185		145.408.369		145.763.265		147.568.867		
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2	2	126.560.738	2	139.987.185	2	145.408.369	2	145.763.265	2	147.568.867		
2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan				6.357.930		6.993.723		7.693.095		8.462.405		9.308.645		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2	2	6.357.930	2	6.993.723	2	7.693.095	2	8.462.405	2	9.308.645		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.440.507.407		1.592.906.789		1.659.238.093		1.671.422.210		1.700.162.023		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				643.738.049		711.842.719		741.485.041		746.929.914		759.773.243		
Meningkatnya kesesuaian pengelolaan arsip	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip (%)	79	80	245.849.109	81	272.892.510	82	283.808.211	83	284.676.315	84	292.897.108	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				253.300.239		278.456.750		290.763.632		291.701.293		292.648.328		
Meningkatnya arsip dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase arsip Dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	100	127.785.940	100	141.842.393	100	147.516.089	100	147.021.272	100	146.521.506		
2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				81.218.900		90.152.979		93.759.098		92.726.711		91.684.000		
Terkelolanya Penciptaan dan	Jumlah Naskah Dinas yang	100	100	81.218.900	100	90.152.979	100	93.759.098	100	92.726.711	100	91.684.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penggunaan Arsip Dinamis	Diciptakan dan Digunakan (Berkas)													
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				46.567.040		51.689.414		53.756.991		54.294.561		54.837.506		
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	100	100	46.567.040	100	51.689.414	100	53.756.991	100	54.294.561	100	54.837.506		
Meningkatnya Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	Persentase Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	0	90	656.129	91	728.303	92	757.435	93	765.010	94	772.660		
2.24.02.2.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis				656.129		728.303		757.435		765.010		772.660		
Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	0	1	656.129	1	728.303	1	757.435	1	765.010	1	772.660		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				143.759.830		159.573.411		165.956.348		167.615.910		176.636.078		
Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	100	117.407.040	100	130.321.814	100	135.534.687	100	136.890.033	100	145.602.942		
2.24.02.2.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip				300.000		333.000		346.320		349.783		7.697.289		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	0	1	300.000	1	333.000		346.320	1	349.783	1	7.697.289		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				116.807.040		129.655.814		134.842.047		136.190.467		137.552.372		
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	512	200	116.807.040	250	129.655.814	300	134.842.047	350	136.190.467	400	137.552.372		
2.24.02.2.02.0005 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				300.000		333.000		346.320		349.783		353.281		
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	0	1	300.000	1	333.000	1	346.320	1	349.783	1	353.281		
Meningkatnya ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip (%)	80,76	84	397.888.940	85	438.950.209	86	457.676.830	87	462.253.599	88	466.876.135		
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				253.300.239		278.456.750		290.763.632		291.701.293		292.648.328		
Meningkatnya OPD yang telah dilaksanakan audit kearsipan	Persentase OPD yang telah dilaksanakan audit kearsipan	100	100	123.658.170	100	134.554.054	100	141.104.828	100	142.515.879	100	143.941.038		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip				123.058.170		133.888.054		139.243.575		140.636.014		142.042.374		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	31	47	123.058.170	47	133.888.054	47	139.243.575	47	140.636.014	47	142.042.374		
2.24.02.2.01.0005 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				300.000		333.000		1.514.933		1.530.082		1.545.383		
Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	31	47	300.000	47	333.000	47	1.514.933	47	1.530.082	47	1.545.383		
2.24.02.2.01.0009 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				300.000		333.000		346.320		349.783		353.281		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	31	47	300.000	47	333.000	47	346.320	47	349.783	47	353.281		
Meningkatnya perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	Persentase perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	100	100	1.200.000	100	1.332.000	100	1.385.280	100	1.399.132	100	1.413.124		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.24.02.2.01.0006 - Penyusunan Database Arsiparis				300.000		333.000		346.320		349.783		353.281		
Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis (Dokumen)	0	23	300.000	23	333.000	23	346.320	23	349.783	23	353.281		
2.24.02.2.01.0007 - Pemilihan Arsiparis Teladan				300.000		333.000		346.320		349.783		353.281		
Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	0	1	300.000	1	333.000	1	346.320	1	349.783	1	353.281		
2.24.02.2.01.0008 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip				300.000		333.000		346.320		349.783		353.281		
Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)	0	1	300.000	1	333.000	1	346.320	1	349.783	1	353.281		
2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota				300.000		333.000		346.320		349.783		353.281		
Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	31	47	300.000	47	333.000	47	346.320	47	349.783	47	353.281		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip				143.759.830		159.573.411		165.956.348		167.615.910		176.636.078		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Statis Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	Persentase Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	100	100	26.352.790	100	29.251.597	100	30.421.661	100	30.725.877	100	31.033.136		
2.24.02.2.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				26.352.790		29.251.597		30.421.661		30.725.877		31.033.136		
Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	250	55	26.352.790	60	29.251.597	65	30.421.661	70	30.725.877	75	31.033.136		
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				246.677.980		273.812.558		284.765.061		287.612.711		290.488.837		
Meningkatnya jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	100	246.677.980	100	273.812.558	100	284.765.061	100	287.612.711	100	290.488.837		
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				82.456.260		91.526.449		95.187.507		96.139.382		97.100.775		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	100	100	82.456.260	100	91.526.449	100	95.187.507	100	96.139.382	100	97.100.775		
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				164.221.720		182.286.109		189.577.554		191.473.329		193.388.062		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	31	47	164.221.720	47	182.286.109	47	189.577.554	47	191.473.329	47	193.388.062		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				701.114.808		775.289.687		807.574.047		813.504.225		827.492.288		
Meningkatnya cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	64,3	64,5	341.960.548	64,6	379.576.209	64,7	394.759.257	64,8	398.706.850	64,9	405.543.799	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di				84.247.521		93.514.749		97.255.339		98.227.892		100.192.451		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
Meningkatnya kesesuain kegiatan Pemusnahan arsip	Tingkat kesesuain kegiatan Pemusnahan arsip	100	100	84.247.521	100	93.514.749	100	97.255.339	100	98.227.892	100	100.192.451		
2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				35.636.662		39.556.695		41.138.963		41.550.352		42.381.360		
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	100	100	35.636.662	100	39.556.695	100	41.138.963	100	41.550.352	100	42.381.360		
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				48.610.859		53.958.054		56.116.376		56.677.540		57.811.091		
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	100	100	48.610.859	100	53.958.054	100	56.116.376	100	56.677.540	100	57.811.091		
2.24.03.2.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				61.646.903		68.428.063		71.165.178		71.876.837		73.314.375		
Meningkatnya kesesuaian kegiatan	Tingkat kesesuaian kegiatan	100	100	61.646.903	100	68.428.063	100	71.165.178	100	71.876.837	100	73.314.375		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana	perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana													
2.24.03.2.02.0001 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana				36.339.379		40.336.711		41.950.172		42.369.681		43.217.076		
Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	100	110	36.339.379	120	40.336.711	130	41.950.172	140	42.369.681	150	43.217.076		
2.24.03.2.02.0002 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana				25.307.524		28.091.352		29.215.006		29.507.156		30.097.299		
Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	100	110	25.307.524	120	28.091.352	130	29.215.006	140	29.507.156	150	30.097.299		
2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				196.066.124		217.633.397		226.338.740		228.602.121		232.036.973		
Meningkatnya arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	Persentase arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	80	82	196.066.124	83	217.633.397	84	226.338.740	85	228.602.121	86	232.036.973		
2.24.03.2.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang				41.344.399		45.892.283		47.727.974		48.205.254		49.169.360		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	457	110	41.344.399	120	45.892.283	130	47.727.974	140	48.205.254	150	49.169.360		
2.24.03.2.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				57.188.199		63.478.901		66.018.057		66.678.238		68.011.803		
Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	457	30	57.188.199	40	63.478.901	50	66.018.057	60	66.678.238	70	68.011.803		
2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				97.533.526		108.262.213		112.592.709		113.718.629		114.855.810		
Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	457	30	97.533.526	40	108.262.213	50	112.592.709	60	113.718.629	70	114.855.810		
Meningkatnya penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan /Pemekaran yang telah di autentikasi	Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan /Pemekaran yang telah di autentikasi (%)	60	70	359.154.260	80	395.713.478	90	412.814.790	100	414.797.375	100	421.948.489		
2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang				217.100.720		240.981.799		254.841.594		261.139.947		266.293.651		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan														
Meningkatnya arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	80	82	217.100.720	83	240.981.799	84	254.841.594	85	261.139.947	86	266.293.651		
2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		83.250.000		86.580.000		87.445.800		88.693.568		
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	5	10	75.000.000	15	83.250.000	20	86.580.000	25	87.445.800	30	88.693.568		
2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.720		111.000.799		115.440.830		116.595.238		118.927.143		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	7	10	100.000.720	13	111.000.799	16	115.440.830	19	116.595.238	22	118.927.143		
2.24.03.2.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				8.700.000		9.657.000		10.043.280		13.893.650		14.171.523		
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	0	1	8.700.000	2	9.657.000	3	10.043.280	4	13.893.650	5	14.171.523		
2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				33.400.000		37.074.000		42.777.484		43.205.259		44.501.417		
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	0	25	33.400.000	30	37.074.000	35	42.777.484	40	43.205.259	45	44.501.417		
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil				142.053.540		154.731.679		157.973.196		153.657.428		155.654.838		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Alih Media Kabupaten/Kota														
Meningkatnya autentikasi dan alih media arsip statis	Persentase autentikasi dan aliih media arsip statis	80	82	142.053.540	83	154.731.679	84	157.973.196	85	153.657.428	86	155.654.838		
2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				100.000.720		108.053.049		109.427.421		107.573.945		108.649.685		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	245	110	100.000.720	120	108.053.049	130	109.427.421	140	107.573.945	150	108.649.685		
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				42.052.820		46.678.630		48.545.775		46.083.483		47.005.153		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	362	110	42.052.820	120	46.678.630	130	48.545.775	140	46.083.483	150	47.005.153		
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				95.654.550		105.774.383		110.179.005		110.988.071		112.896.492		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	82,46	84	95.654.550	85	105.774.383	86	110.179.005	87	110.988.071	88	112.896.492	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota				95.654.550		105.774.383		110.179.005		110.988.071		112.896.492		
Meningkatnya usulan pengajuan pengguna an arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	Persentase usulan pengajuan pengguna an arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	82,46	84	95.654.550	85	105.774.383	86	110.179.005	87	110.988.071	88	112.896.492		
2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				53.295.010		53.295.011		53.295.011		55.494.036		56.448.247		
Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	5	5	53.295.010	5	53.295.011	5	53.295.011	5	55.494.036	5	56.448.247		
2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				42.359.540		52.479.372		56.883.994		55.494.035		56.448.245		
Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan	240	210	42.359.540	220	52.479.372	230	56.883.994	240	55.494.035	250	56.448.245		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)													

4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Semarang. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	71,58	73	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5	
2.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Angka	91	94,43	94,44	94,45	94,46	94,47	94,48	
3.	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	Angka	69,59	70	71	72	73	74	75	
4.	Tingkat Ketersediaan Arsip	Angka	80,76	83	84	85	86	87	88	

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang literat informasi dan peningkatan tata kelola kearsipan yang tertib, Dinas Arsip dan Perpustakaan menetapkan dua indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2030. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program strategis di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

- **Satuan**: Indeks (0–100)
- **Target Tahun 2025–2030**: 73 → 73,5
- **Uraian**: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemajuan literasi masyarakat secara agregat, mencakup aspek ketersediaan layanan perpustakaan, tingkat kunjungan dan partisipasi masyarakat, serta keterlibatan dalam program literasi. Peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa layanan perpustakaan daerah semakin inklusif, responsif, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Upaya peningkatan dilakukan melalui penguatan program literasi berbasis inklusi sosial, pembinaan perpustakaan sekolah dan komunitas, pengembangan koleksi lokal, serta pemberdayaan pustakawan dan tenaga perpustakaan. Inovasi layanan seperti pojok baca digital, perpustakaan keliling, serta integrasi teknologi informasi juga menjadi bagian dari strategi pencapaian target.

Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah

- **Satuan**: Nilai (0–100)

- **Target Tahun 2025–2030**: 94,43 → 94,48
- **Uraian**: Nilai pengawasan kearsipan daerah adalah hasil penilaian terhadap kepatuhan dan implementasi kebijakan kearsipan di lingkungan perangkat daerah. Penilaian ini dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui instrumen pengawasan internal maupun eksternal.

Target peningkatan nilai ini mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat sistem kearsipan daerah, termasuk pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip statis secara tertib dan sesuai regulasi. Langkah-langkah strategis yang diambil antara lain peningkatan kapasitas SDM kearsipan, optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), dan peningkatan kualitas sarana-prasarana depo arsip.

Melalui kedua indikator tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan menempatkan literasi dan kearsipan sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, transparan, dan berdaya saing. Arah kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat transformatif, dengan menekankan pada kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Diharapkan, target-target yang telah ditetapkan ini dapat mendorong terciptanya tata kelola perpustakaan dan kearsipan yang efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

4.3. Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci.

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Positif	Angka	71,58	73	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5	
2.	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	Positif	%	69,59	70	71	72	73	74	75	
3.	Pengunjung perpustakaan per tahun	Positif	%	83	84	84,83	85,67	86,5	87,33	88,16	
4.	Indeks Lembaga Kearsipan Daerah	Positif	Nilai	73	75	76	76,5	77	77,5	78	
5.	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Positif	Arsip	70	75	80	85	90	95	100	

Tingkat kegemaran membaca masyarakat merupakan indikator yang mengukur sejauh mana kegemaran membaca masyarakat Kota Semarang yang diukur melalui metode survey dengan dimensi utama Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca.

Peningkatan target secara bertahap menunjukkan adanya strategi berkelanjutan yang dilakukan Dinas, seperti:

- Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Pemanfaatan teknologi informasi (e-library, aplikasi peminjaman digital).
- Peningkatan kualitas dan keragaman koleksi bahan pustaka.
- Peningkatan kompetensi pustakawan dalam pelayanan publik.

Strategi ini diharapkan dapat mendorong antusiasme masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai sumber pembelajaran dan pengembangan diri.

Indikator Persentase Peningkatan Ketersediaan Arsip menggambarkan peningkatan jumlah arsip yang tersedia dan terdokumentasi secara tertib, baik arsip dinamis maupun arsip statis. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan tata kelola arsip di lingkup pemerintahan daerah.

Upaya untuk mencapai target ini meliputi:

- Implementasi aplikasi SRIKANDI untuk tata kelola arsip digital.
- Pembinaan dan asistensi kepada seluruh OPD agar memenuhi standar kearsipan.
- Pengelolaan dan akuisisi arsip statis secara sistematis.
- Penyediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang sesuai standar.

Dengan meningkatnya ketersediaan arsip, maka informasi pemerintahan akan lebih mudah diakses, dilestarikan, serta digunakan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik.

Kedua indikator ini saling melengkapi dalam mencerminkan dua peran utama Dinas Arsip dan Perpustakaan:

- **Perpustakaan** sebagai pusat pembelajaran masyarakat dan penguatan budaya literasi.
- **Kearsipan** sebagai pilar dokumentasi yang menjamin akuntabilitas dan memori kolektif daerah.

.

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Terkait hal tersebut, saat penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 dokumen Renstra Tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Maka Renja disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025-2029, serta RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD disusun dengan mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 periode pertama, serta memperhatikan Visi, Misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2025-2030. Adapun Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2026 tersebut akan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025-2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan serta sub kegiatan, agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Seluruh personil Dinas Arsip dan Perpustakaan beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
c. Untuk penjabaran Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 lebih lanjut, akan disusun Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Arsip dan Perpustakaan beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan secara berkesinambungan; yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

24. DINAS PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Pada Dinas Perikanan Kota Semarang maka Dinas Perikanan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang Perikanan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142)
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140)
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7)
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Perikanan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan

2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Perikanan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Perikanan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Perikanan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Pada Dinas Perikanan Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Perikanan Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Permbudidayaan Ikan, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, dan Bidang Perikanan Tangkap
- Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota
- Pengkoordinasian tugas – tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Permbudidayaan Ikan, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, dan Bidang Perikanan Tangkap, dan UPTD
- Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas
- Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pengelolaan Permbudidayaan Ikan, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, dan Bidang Perikanan Tangkap
- Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas
- Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Permbudidayaan Ikan, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, dan Bidang Perikanan Tangkap, dan UPTD
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Permbudidayaan Ikan, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, dan Bidang Perikanan Tangkap, dan UPTD
- Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA SEMARANG

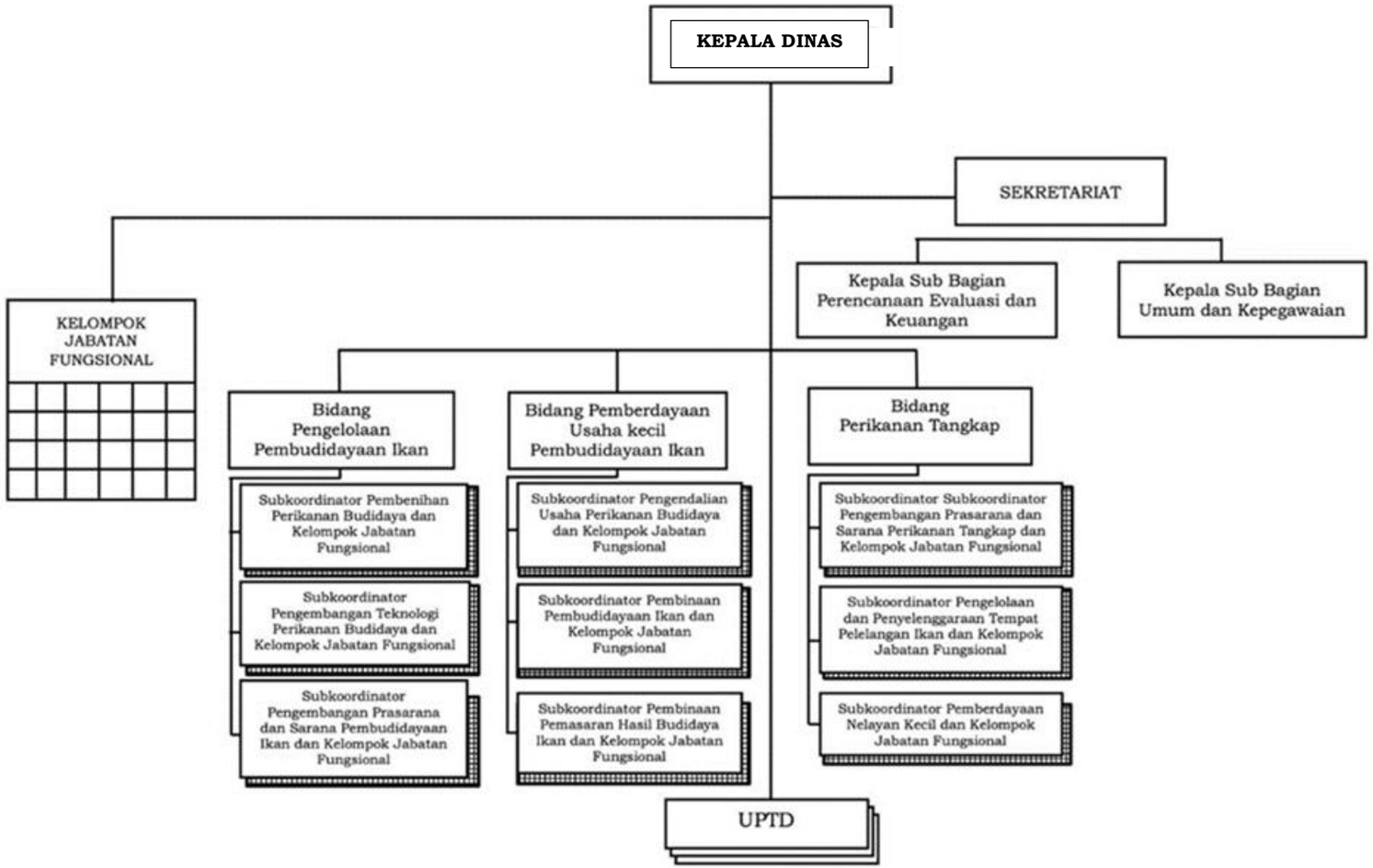

a. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perikanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Pada Dinas Perikanan, uraian tugas jabatan struktural Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perikanan

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Perikanan di klasifikasikan ke dalam ASN dan Non ASN. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	1	5	-	9
3	D3	1	1	-	-	2
4	S1	3	8	-	-	11
5	S2	3	5	-	-	8
6	S3	-	-	-	-	-
	JUMLAH					30

Dari jumlah pegawai sebanyak 30 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada 2728able berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	-	1
2	Golongan III	2	11	13
3	Golongan IV	2	3	5
4	P3K Golongan V	1	2	3
5	P3K Golongan VII	1	-	1
6	P3K Golongan IX	2	-	2
	JUMLAH			25

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perikanan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Perikanan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000001	9,306.00	2005	Jl. Pengapon Raya No. 39 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur	Hak Pakai	11/11/2005	18	Pasar Ikan	PEMBELIAN	9.306.000,00	Terdapat PIH dan Sentra Ikan Hias
2	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	01.01.02.01.003	000001	20,500.00	2007	Jl. RM Hadi Subeno/Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen	Hak Pakai	12/5/2007	00021	Balai Benih Ikan	PEMBELIAN	4.000.000,00	
3	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	000001	29,496.00	2014	RT 01 RW 04 Si Plurahan Sumurjurang Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunung Pati	Hak Pakai			Pertanian	PEMBELIAN	704.000,00	Ps 131a - Ex-Bengkok - 50.13.15.00
4	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	000002	8,850.00	2014	RT 01 RW 04 Si Padak Sumur Jurang Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunung Pati	Hak Pakai				PEMBELIAN	566.400,00	Ps 122 - Ex-Bengkok - 50.13.15.00
5	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	000003	6,200.00	1945	RT 01 RW 04 Sumurjurang Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati	Hak Pakai			Pertanian	PEMBELIAN	400.000,00	Ps. 92/S - Ex-Bengkok siringin
6	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	000004	8,772.00	2011	RT 01 RW 04 Ds. Siwatu Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunung Pati	Hak Pakai	4/30/2007	HP. 19	Pertanian	PEMBELIAN	300.000,00	Ps. 130 /S I Bengkok Bondo deso - Ex-Bengkok - 50.13.15.00
7	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	000005	2,502.00	2011	RT 01 RW 04 Siwatu Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunung Pati	Hak Pakai	4/30/2007	HP. 17	Pertanian	PEMBELIAN	400.000,00	Ps. 4/S.I Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.13.15.00
8	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	000006	6,882.00	2011	RT 01 RW 04 Siwatu Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunung Pati	Hak Pakai	4/30/2007	HP. 18	Pertanian	PEMBELIAN	200.000,00	Ps. 2 /S III Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.13.15.00
9	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	000007	6,572.00	2011	RT 01 RW 04 Siwatu Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunung Pati	Hak Pakai	4/30/2007	HP. 11	Pertanian	PEMBELIAN	175.000,00	Ps. 111 / S.III Bengkok Lurah - Lain-Lain - 50.13.15.00
10	Tanah Hutan Cadangan	01.01.02.04.002	000003	4,161.00	1976	Jl Tugurejo RT.07 RW.V Kel Tugurejo kec Tugu	Hak Pakai	7/26/2007	HP 21	Hutan Kota	PEMBELIAN	432.000,00	- Ex-Bengkok - 50.16.02.00
11	Tanah Hutan Cadangan	01.01.02.04.002	000003	5,106.00	1976	Jl Tugurejo RT.07 RW.V Kel Tugurejo kec Tugu	Hak Pakai	7/26/2007	HP 20	Hutan Kota	PEMBELIAN	409.600,00	- Ex-Bengkok - 50.16.02.00
12	Tanah Hutan Cadangan	01.01.02.04.002	000004	4,446.00	1976	Jl Tugurejo RT.07 RW.V Kel Tugurejo kec Tugu	Hak Pakai	8/7/2007	HP 28	Hutan Kota	PEMBELIAN	380.800,00	- Ex-Bengkok - 50.16.02.00
13	Tanah Hutan Lindung	01.01.02.04.003	000001	2,254.00	2013	Tugurejo, RW 5	Hak Pakai	8/7/2007	HP 25	Hutan Kota	PEMBELIAN	304.290,00	- Ex-Bengkok - 50.16.02.00

14	Tanah Hutan Cagar Alam	01.01.02.04.004	000001	1,973.00	2013	Tugurejo RW V	Hak Pakai	8/7/2007	HP 26	Hutan Kota	PEMBELIAN	256.490,00	- Ex-Bengkok - 50.16.02.00
15	Tanah Hutan Cagar Alam	01.01.02.04.004	000002	2,548.00	2013	Jl Tugurejo RT.07 RW.V Kel Tugurejo kec Tugu	Hak Pakai	8/7/2007	HP 29	Hutan Kota	PEMBELIAN	293.020,00	- Ex-Bengkok - 50.16.02.00
16	Tanah Hutan Cagar Alam	01.01.02.04.004	000003	2,019.00	2013	Jl Tugurejo RT.07 RW.V Kel Tugurejo kec Tugu	Hak Pakai	8/7/2007	HP. 36	hutan kota	PEMBELIAN	242.280,00	- Ex-Bengkok - 50.16.02.00
17	Tanah Lapangan Sepak Bola	01.01.03.01.005	000001	4,350.00	1976	Jl Tugurejo RT.06 RW.I Kel Tugurejo kec Tugu	Hak Pakai	12/28/2007	HP 43	Lapangan Sepak Bola RW I	PEMBELIAN	748.800,00	- Ex-Bengkok - 50.16.02.00
										Jumlah Harga		19.118.680,00	

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Perikanan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000001	Baik	Tidak	Beton	50	Jl. Moedal Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunung Pati	8/5/2021	B/640.2/523/VIII /2021		Tanah Hak Pakai		Pembelian	214.838,50	untuk Kantor
2	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	03.01.01.02.006	000001	Baik			50	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	70.272,51	di BBI (Gudang)
3	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000001	Baik	Tidak	Beton	35	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen	12/5/2014	523/684/14		Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	73.569,00	di BBI (Workshop)
4	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.01.01.05.001	000001	Baik	Tidak	Beton	54	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0002	PEMBELIAN	98.184,00	di BBI Mijen
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.01.01.08.001	000001	Baik	Tidak	Beton	25	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	52.221,00	Mushola di BBI
6	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	03.01.01.09.001	000001	Baik	Tidak	Beton	135	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	343.331,41	di BBI (Gedung Pertemuan SeRusak Berata Guna)
7	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	03.01.01.09.007	000001	Baik	Tidak	Beton	42	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen	5/16/2018	027/483.2/18		Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	Pembelian	207.054,69	Panggung
8	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000001	Baik	Bertingkat	Beton	1600	Jl. Pengapon Raya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur				Tanah Milik Pemda	01.01.01.02.001.0001	PEMBELIAN	12.049.866,50	Untuk pasar ikan higienis (Gedung PIH)
9	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000002	Baik	Tidak	Beton	200	Jl. Pengapon Raya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur				Tanah Milik Pemda	01.01.01.02.001.0002	PEMBELIAN	1.100.410,00	Untuk sentra ikan hias (Sentra Ikan Hias)
10	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000003	Baik	Tidak		45	Jl. Pengapon Raya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur	11/16/2021	B/930.1/523/XI/ 2021		Tanah Milik Pemda	01.01.01.02.001.0001	Pembelian	312.969,78	kios
11	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000004	Baik	Tidak	Beton	9	Jl. Pengapon Raya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur	11/16/2021	B/930.1/523/XI/ 2021		Tanah Milik Pemda	01.01.01.02.001.0001	Pembelian	62.593,96	kios

12	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000001	Baik	Tidak	Tidak	18	Jl. Raya Semarang Boja				Tanah Hak Pakai	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	25.000,00	(Rumah jaga)
13	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000002	Baik	Tidak	Beton	12	Jl Tugurejo RT.07 RW.V Kel Tugurejo kec Tugu	7/22/2022	B/649/523/VII/2022		Tanah Hak Pakai		Pembelian	278.840,00	di Tugu
14	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000003	Baik	Tidak	Beton	35	Jl. Raya Semarang Boja	11/9/2023	B/1456/523/XI/2023		Tanah Milik Pemda		Pembelian	175.560,30	di BBI Mijen
15	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	03.01.01.13.010	000006	Baik	Tidak	Tidak	4	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen	5/24/2018	027/504/18		Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0006	Pembelian	22.438,77	Gazebo
16	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	03.01.01.13.010	000007	Baik	Tidak	Tidak	4	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen	5/24/2018	027/504/18		Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0007	Pembelian	22.438,77	Gazebo
17	Bangunan TPI Permanen	03.01.01.27.001	000001	Baik	Tidak		100	Tambakmulyo RT 4 RW XV Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara	12/31/2021					Pembelian	192.944,00	
18	Bangunan Kolam/Bak Ikan	03.01.01.29.002	000001	Baik	Tidak	Beton	160	Jl. Moedal Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunung Pati	11/27/2022	B/1191/523/XI/2022				Pembelian	1.228.583,04	di Mina Politan Gunung Pati
19	Bangunan Kolam/Bak Ikan	03.01.01.29.002	000002	Baik	Tidak	Tidak	3770	Jl Tugurejo RT.07 RW.V Kel Tugurejo kec Tugu	12/5/2023	B/1720.1/523/XI/2023				Pembelian	226.980,93	di Panti benih air payau Tugurejo
20	Bangunan Kolam/Bak Ikan	03.01.01.29.002	000003	Baik	Tidak	Beton	4200	Sumurejo Kec. Gunungpati	11/10/2023	B/1480/523/XI/2023				Pembelian	229.123,96	di Mina Politan Gunungpati
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	03.01.01.30.001	000001	Baik	Tidak	Beton	135	Jl. Raya Semarang Boja				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	50.000,00	(Kantor BBI)
22	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	03.01.01.37.001	000001	Baik	Tidak	Tidak	130	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen	8/22/2016	523/0626.1/16		Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	119.000,00	(Pergola)
23	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	03.01.02.01.001	000001	Baik	Tidak	Beton	48	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	127.494,41	di BBI (Rumah Dinas)
24	Asrama Permanen	03.01.02.05.001	000001	Baik	Tidak	Beton	100	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	110.029,00	Asrama di BBI
25	Tugu Pembangunan	03.02.01.02.002	000001	Baik	Tidak	Beton	10	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen	10/19/2016	523/816/16		Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	69.975,00	(Gapura pintu masuk BBI)
26	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000001	Baik			3000	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0001	PEMBELIAN	207.370,00	(Pagar keliling)
27	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000002	Baik			3000	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0002	PEMBELIAN	165.642,35	di BBI (Pagar bumi keliling)
28	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000003	Baik			60	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen				Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0003	PEMBELIAN	59.699,00	(Pagar Kolam BBI)
29	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000004	Baik	Tidak	Tidak	30	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen	5/18/2017	027/405/17		Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0004	Pembelian	65.412,32	di BBI Mijen
30	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000005	Baik	Tidak	Tidak	20	Jl. Raya Semarang Boja Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen	9/24/2018	027/775.2/18		Tanah Milik Pemda	01.01.02.01.003.0005	Pembelian	83.745,64	Pagar BRC
31	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000006	Baik	Tidak	Beton	150	Jl Tugurejo RT.07 RW.V Kel Tugurejo kec Tugu	7/18/2022	B/623/523/VII/2022		Tanah Hak Pakai		Pembelian	403.591,12	di Tugu

32	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000007	Baik	Tidak	Tidak	230	Jl. Tugurejo RT.7 RW.V Kel Tugurejo Kec.Tugu						Pembelian	218.880,55	Pagar panti benih ikan air payau
33	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000008	Baik	Tidak	Tidak	87	Minapolitan RT.01 RW.IV Kel. Sumurejo Kec. Gunungpati						Pembelian	219.598,00	Pagar Minapolitan
Jumlah Harga															18.887.658,52	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Perikanan.

Tujuan Dinas Perikanan Kota Semarang pada Renstra 2021-2026 yaitu "meningkatnya produk unggulan perikanan daerah", dengan indikator kinerja adalah prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB. Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 2,96% terealisasi 2,96% dengan capaian kinerja 100%, target tahun 2023 sebesar 2,97% dengan realisasi 2,97% dan mendapatkan capaian kinerja 100%, target tahun 2024 sebesar 2,98% terealisasi 2,98% dengan capaian kinerja 100%.

Dalam mencapai target kinerja pada tujuan Renstra 2021-2026, Dinas Perikanan Kota Semarang menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya laju pertumbuhan produksi perikanan dan ikan olahan
- Meningkatnya produksi perikanan
- Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan
- Tercapainya target pendapatan asli daerah Kota Semarang pada Dinas Perikanan Kota Semarang

1. **Sasaran strategis pertama** yaitu meningkatnya laju pertumbuhan produksi perikanan dan ikan olahan, di implementasikan melalui beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian beberapa indikator sasaran strategis dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Persentase peningkatan produksi perikanan
Dinas Perikanan Kota Semarang memiliki target Persentase peningkatan produksi perikanan tahun 2022 sebesar 2,3 %, terealisasi sebesar 2,3 % dan mendapatkan capaian kinerja 100 %. Target Persentase peningkatan produksi perikanan tahun 2023 sebesar 2,4 %, dengan realisasi sebesar 2,4 % dan mendapatkan capaian kinerja 100%. Target Persentase peningkatan produksi perikanan tahun 2024 sebesar 2,5 %, dengan realisasi sebesar 2,5 % dan mendapatkan capaian kinerja 100 %.

b. Persentase peningkatan produksi ikan olahan
Dinas Perikanan Kota Semarang memiliki target Persentase peningkatan produksi ikan olahan tahun 2022 sebesar 0,50 %, terealisasi sebesar 0,50 % dan mendapatkan capaian kinerja 100 %. Target Persentase peningkatan produksi ikan olahan tahun 2023 sebesar 0,75 %, dengan realisasi sebesar 0,75 % dan mendapatkan capaian kinerja 100%. Target Persentase peningkatan produksi ikan olahan tahun 2024 sebesar 1 %, dengan realisasi sebesar 1 % dan mendapatkan capaian kinerja 100 %.

Capaian laju pertumbuhan produksi perikanan dan ikan olahan 2020-2024 menghasilkan rata-rata sebesar 100 %, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui beberapa program penunjang sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Target indikator kinerja pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan.

Indikator penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan pada tahun 2022 memiliki target 5 kasus dan terealisasi 1 kasus dengan capaian kinerja 80%, pada tahun 2023 memiliki target 4 kasus dan terealisasi 0 kasus dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2024 memiliki target 3 kasus dan terealisasi 0 kasus dengan capaian kinerja 100%.

2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Target indikator kinerja pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai berikut:

a. Produksi Ikan Olahan

Indikator produksi ikan olahan pada tahun 2020 terealisasi 17.485 ton/tahum, pada tahun 2021 terealisasi 17.506,11 ton/tahun, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 17.495,45 ton/tahun dan terealisasi 17.604,14 ton/tahun dengan capaian kinerja 100,63 %, pada tahun 2023 memiliki target sebesar 17.557,29 ton/tahun dan terealisasi 17.688,976 ton/tahun dengan capaian kinerja 100,75 %, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 17.631,94 ton/tahun dan terealisasi 17.802,22 ton/tahun dengan capaian kinerja 100,97 %.

Tabel 2.5
Produksi Ikan Olahan

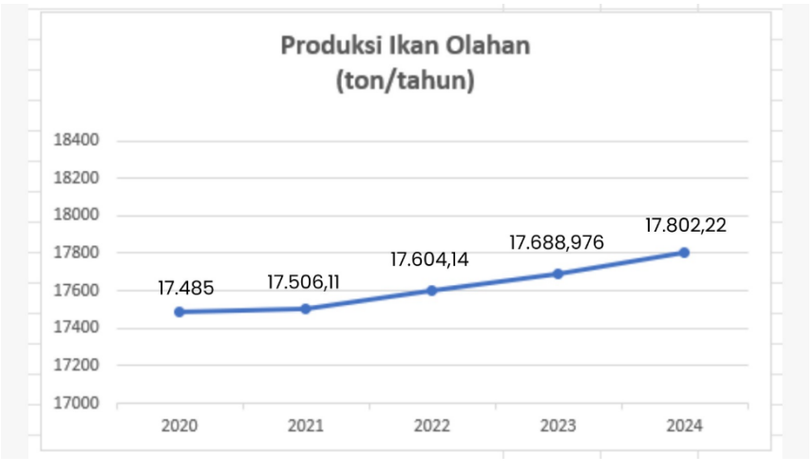

b. Angka Konsumsi Ikan Per Kapita

Indikator angka konsumsi ikan pada tahun 2020 terealisasi 40,16 kg/kapita/th, pada tahun 2021 terealisasi 40,166 kg/kapita/th, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 40,17 kg/kapita/th dan terealisasi 40,25 kg/kapita/th dengan capaian kinerja 100,20 %, pada tahun 2023 memiliki target sebesar 40,18 kg/kapita/th dan terealisasi 43,75 kg/kapita/th dengan capaian kinerja 108,89 %, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 44,05 kg/kapita/th dan terealisasi 44,18 kg/kapita/th dengan capaian kinerja 100,30 %.

Tabel 2.6
Data Konsumsi Ikan

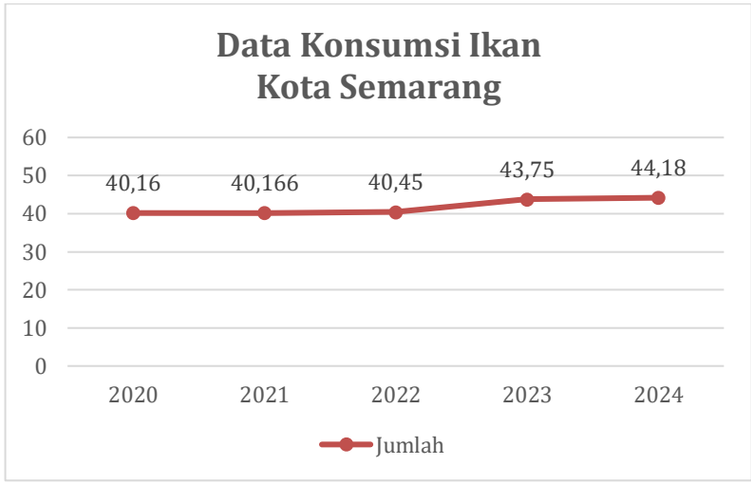

Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya laju pertumbuhan produksi perikanan dan ikan olahan dapat mencapai target dikarenakan: Adanya diversifikasi olahan ikan, adanya promosi melalui media online, serta adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam industry perikanan dan pengolahan ikan.
Selain itu terdapat juga kendala yang dihadapi, antara lain:

- Ketersediaan ikan yang tidak merata di seluruh wilayah
- Harga ikan yang relative mahal bagi Sebagian masyarakat
- Aksesibilitas yang terbatas ke pasar atau fasilitas penyimpanan ikan
- Kurangnya pengetahuan tentang manfaat Kesehatan dari konsumsi ikan
- Kebiasaan makan yang tidak mencakup ikan
- Kualitas ikan yang tidak segar

2. Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya produksi perikanan di implementasikan melalui beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian beberapa indikator sasaran strategis dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Produksi Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan Kota Semarang terealisasi jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 2.801,12 ton, pada tahun 2021 sebesar 2.901,452 ton, pada tahun 2022 memiliki target Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3.005,61 ton/tahun dan terelasisasi sebesar 3.008,92 ton/tahun dengan capaian kinerja 100,11 %, target pada tahun 2023 target sebesar 3.005,90 ton/tahun dan realisasi sebesar 3.067,446 ton/tahun dengan capaian kinerja 100,38 %, target pada tahun 2024 target sebesar 3.113,69 ton/tahun dan realisasi sebesar 3.115,94 ton/tahun dengan capaian kinerja 100,07 %.

Tabel 2.7
Data Produksi Perikanan Tangkap

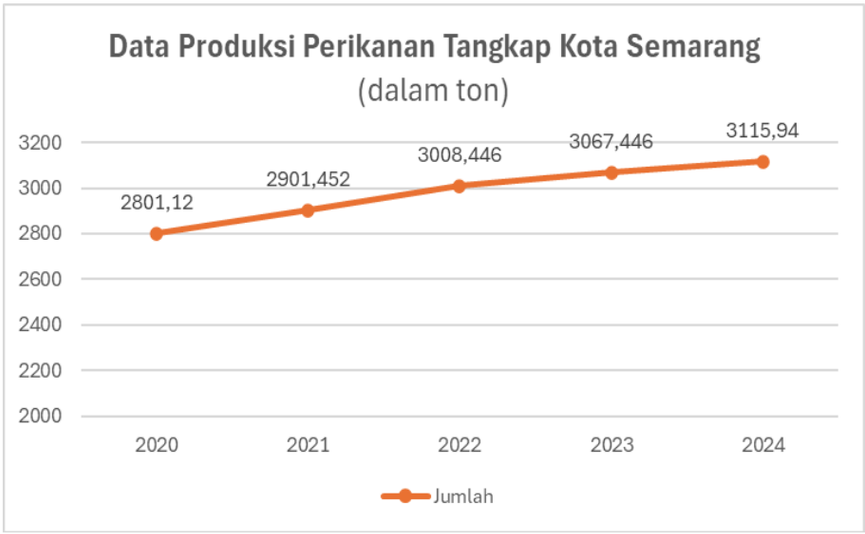

b. Produksi Perikanan Budidaya

Dinas Perikanan Kota Semarang terealisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 3.738 ton, pada tahun 2021 sebesar 3.810,67 ton, pada tahun 2022 memiliki target Produksi Perikanan Budidaya sebesar 3.775,93 ton/tahun dan realisasi sebesar 3.887,87 ton/tahun dengan capaian kinerja 102,97 %, target pada tahun 2023 sebesar 3.845,95 ton/tahun dan realisasi sebesar 3.896,25 ton/tahun dengan capaian kinerja 101,31 %, target pada tahun 2024 sebesar 3.961,32 ton/tahun dan realisasi sebesar 3.961,42 ton/tahun dengan capaian kinerja 100%.

Tabel 2.8
Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan tahun 2020-2024 menghasilkan rata-rata sebesar 100 %, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui beberapa program penunjang sebagai berikut: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya produksi perikanan dapat mencapai target dikarenakan:

- Penggunaan teknologi yang lebih modern dan efisien dalam penangkapan dan budidaya ikan
- Pengembangan infrastruktur pendukung perikanan dan fasilitas budidaya
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam industri perikanan
- Pengembangan metode budidaya yang lebih efektif dan efisien

Selain itu terdapat juga kendala yang dihadapi, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya alam dan keuangan
- Perubahan iklim dapat mempengaruhi populasi ikan dan kualitas air

Pada Perikanan Tangkap kendala yang dihadapi:

- Overfishing, yaitu penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan
- Kerusakan lingkungan laut dan habitat ikan dapat mempengaruhi populasi ikan
- Peralatan tangkap yang tidak efektif atau tidak ramah lingkungan

Pada Perikanan Budidaya kendala yang dihadapi:

- Penyakit pada ikan budidaya dapat menyebabkan kerugian besar
- Kualitas air yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan ikan
- Biaya pakan yang tinggi dapat mempengaruhi keuntungan

3. **Sasaran strategis ketiga** yaitu terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan di implementasikan melalui beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian beberapa indikator sasaran strategis Nilai AKIP. Dimana target yang ditentukan pada tahun 2022 sebesar 70 dan realisasi sebesar 77 dengan capaian kinerja 100 %, target pada tahun 2023 sebesar 71 dan realisasi sebesar 77,55 dengan capaian kinerja 100 %, target pada tahun 2024 sebesar 72 dan realisasi sebesar 78,75 dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan tahun 2020 – 2024 menghasilkan rata – rata 100 %. Upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui beberapa program penunjang sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yaitu persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan dimana target dari tahun 2022 – 2024 sebesar 100 % dan realisasi dari tahun 2022 – 2024 sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran strategis ketiga terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan dapat mencapai target dikarenakan:

- Sumber daya manusia yang kompeten dan terampil
- Sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam mengelola pelayanan
- Penggunaan teknologi yang modern dan efektif dalam pelayanan

- Komunikasi yang baik antara petugas pelayanan dan masyarakat
- Pengawasan yang efektif untuk memastikan kualitas pelayanan
- Pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan
- Kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi pelayanan yang berkualitas

Selain itu terdapat juga kendala yang dihadapi, antara lain: kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perikanan.

a. Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Perikanan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Tujuan dan Sasaran																		
1	Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	%	-	-	-	-	2,96	2,97	2,98	-	-	2,96	2,97	2,98	-	-	100 %	100 %	100 %
2	Produksi perikanan (tangkap & budidaya)	ton	-	-	6179,04	6487,98	6781,54	6901,85	7075,02	6539,12	6712,12	6896,79	6963,696	7077,36	105,83 %	103,45 %	101,70 %	100,90 %	100 %
3	Produksi perikanan tangkap	ton	-	-	2726,49	2862,81	3005,61	3055,90	3113,69	2801,12	2901,45	3008,92	3067,446	3115,94	102,74 %	101,94 %	100,11 %	100,38 %	100,07 %
4	Produksi perikanan budidaya	ton	-	-	3452,55	3625,17	3775,93	3845,95	3961,33	3738	3810,67	3887,87	3896,25	3961,42	108,27 %	105,12 %	102,97 %	101,31 %	100 %
5	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	kasus	-	-	-	-	5	4	3	-	-	1	0	0	-	-	80 %	100 %	100 %
6	Produksi ikan olahan	ton	-	-	16860,42	17113,32	17495,45	17557,29	17631,86	17485	17506,107	17604,14	17688,976	17802,22	103,71 %	102,30 %	100,63 %	100,75 %	100,97 %
7	Agka konsumsi ikan	Kg / kapita / tahun	-	-	32,58	33,06	40,17	40,18	40,19	40,16	40,166	40,25	43,75	44,18	123,26 %	121,49 %	100,20 %	108,89 %	100,30 %

Keterangan :

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
		13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
3	Satuan kinerja	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun		

Rumus rasio adalah : $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun}} \times 100\%$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perikanan. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perikanan. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Perikanan.

- **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perikanan Kota Semarang bersumber dari Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan, Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Capaian Pendapatan Asli Daerah untuk sektor perikanan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 lebih dari 95 %, pada tahun 2022; 100,2 % pada tahun 2023; 98,67 % pada tahun 2024; 97,69 %.

- **Belanja Daerah**

Belanja daerah pada Dinas Perikanan meliputi Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan operasional serta pembangunan bidang perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2022-2024 berturut-turut sebesar 88,67 %; 87,13 %; 90,07 %. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas serta silpa pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dioptimalkan menyebabkan rasio Belanja tidak terserap 100 %.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pendapatan	100.000.000	170.856.000	232.000.000	266.800.000	281.266.367	111.741.053	187.860.283	232.479.613	263.263.798	274.780.517	111,74 %	109,95 %	100,2 %	98,67 %	97,69 %	31,77 %	27,37 %
Belanja	8.758.758.219	12.348.585.774	13.874.273.990	14.288.566.090	12.828.527.156	8.327.692.133	11.037.849.711	12.302.166.782	12.450.321.840	11.554.458.748	95,08 %	89,38 %	88,67 %	87,13 %	90,07 %	46,12 %	38 %
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

1	Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
3	Anggaran tahun kedua renstra disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
4	Anggaran tahun ketiga renstra disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
5	Anggaran tahun keempat renstra disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
6	Anggaran tahun elima renstra disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keternagan 2-6
7	Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keternagan 7 -11
8	Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun		
9	Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun		
11	Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun		

Rumus rasio adalah : $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan : $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

c. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Perikanan Kota Semarang meliputi:

- Kementrian Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
- Pertamina, BUMN, Bank Swasta serta Perusahaan

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja Dinas Perikanan, dukungan BUMD ikut berperan aktif seperti Bank Jawa Tengah.

e. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

-

f. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang yaitu Aplikasi "SISTEM INFORMASI SPASIAL UMKM PERIKANAN KOTA SEMARANG"" (SIUMPAN).

Maksud pembuatan Sistem Informasi Spasial UMKM Perikanan Kota Semarang adalah menyusun sebuah database UMKM perikanan di Kota Semarang berbasis spasial online yang terintegrasi dalam aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone (aplikasi android).

Tujuan pembuatan Sistem Informasi Spasial UMKM Perikanan Kota Semarang adalah menyusun sebuah aplikasi database UMKM Perikanan Kota Semarang berbasis geospasial berbasis website dan berbasis android. Sistem informasi ini diberi nama SIUMPAN yaitu kepanjangan dari Sistem Informasi Spasial UMKM Perikanan.

Sasaran Inovasi Sistem Informasi Spasial UMKM Perikanan Kota Semarang adalah :

- Mengoptimalkan pemasaran produk UMKM Perikanan Kota Semarang
- Masyarakat pengguna aplikasi disediakan akses, informasi lengkap, dan interaksi dengan UMKM Perikanan Kota Semarang
- Tersedianya basisdata spasial UMKM perikanan di Kota Semarang berbasis website (WebGIS UMKM Perikanan Kota Semarang)
- Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Spasial UMKM Perikanan yang dapat diakses baik melalui website maupun berbasis android.

g. Penghargaan Perangkat Daerah

-

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan sebagai berikut:

- Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan
- Pencemaran lingkungan
- Belum optimalnya pendapatan pelaku usaha perikanan

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Perikanan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- Pengembangan sektor perikanan
- Penyediaan sarana dan prasarana perikanan
- Pariwisata bahari

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Perikanan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perikanan telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perikanan.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Walikota Semarang Nomor 113 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Pada Dinas Perikanan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perikanan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Perikanan yaitu: “Belum optimalnya daya saing sektor perikanan dan kelautan” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya daya saing sektor perikanan dan kelautan”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya kinerja perikanan tangkap	Keterbatasan sarana prasara yang dimiliki nelayan
		Penurunan hasil tangkapan nelayan kecil
		Rendahnya kesadaraan nelayan untuk melelangkan hasil tangkapan
2.	Belum optimalnya pengawasan ekosistem laut	Kurangnya pengawasan pelaku usaha perikanan
3.	Belum optimalnya produksi pembudidayaan ikan	Masih terbatasnya sarana pembenihan ikan
		Masih terbatasnya prasarana pembudidayaan ikan
		Keterbatasan debet air dan kualitas air untuk pembudidaya ikan
4.	Belum optimalnya produk hasil perikanan	Belum optimalnya pembinaan mutu usaha perikanan
		Belum optimalnya kualitas pemasaran usaha mikro pembudidaya perikanan
		Belum optimalmnya kualitas usaha perikanan budidaya (belum tersertifikasi dan izin usaha)
5.	Belum optimlanya penyelenggaraan fungsi kelembagaan	Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Perikanan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Perikanan

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Perikanan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana prasara yang dimiliki nelayan
2. Penurunan hasil tangkapan nelayan kecil
3. Rendahnya kesadaraan nelayan untuk melelangkan hasil tangkapan
4. Kurangnya pengawasan pelaku usaha perikanan
5. Masih terbatasnya sarana pembenihan ikan
6. Masih terbatasnya prasarana pembudidayaan ikan
7. Keterbatasan debet air dan kualitas air untuk pembudidaya ikan
8. Belum optimalnya pembinaan mutu usaha perikanan
9. Belum optimalnya kualitas pemasaran usaha mikro pembudidaya perikanan
10. Belum optimalmnya kualitas usaha perikanan budidaya (belum tersertifikasi dan izin usaha)
11. Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan
12. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Perikanan
13. Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Perikanan

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, untuk mencapai visi Presiden tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari RPJMN Tahun 2025-2029 adalah untuk mendukung visi berupa: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) misi berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia. Sasaran Presiden Republik Indonesia selama periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju
2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Perikanan Kota Semarang mendukung pencapaian sasaran yaitu “kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang”. Upaya ini akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan sektor yang kompleks dengan berbagai pelaku usaha mulai dari hulu hingga hilir. Sehingga, melalui peningkatan daya saing sektor perikanan ini harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan pada pelaku usaha yang terlibat.

Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Perikanan serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan social, Lestari dan inklusif”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Perikanan, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk pencapaian visi misi ini adalah:

“Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Perikanan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:
1. Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan dan kelautan
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator: “Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan”.

b. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Tabel 2.12

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP Tahun 2025-2029 (2/2)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Goals	Arah Kebijakan	Objectives	Control and Check Point	Baseline 2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029
Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan	Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan PPK	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	101,76	105-108	106-108	107-108	108-109	109-110
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	102,07	103,25	103,50	103,75	104,00	104,25
			Nilai Tukar Petambak Garam	129,62	130	130,25	130,50	130,75	131
		Meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya KP	Peningkatan Indeks Kepatuhan Sektor KP	Indikator baru	76,00	77,7	80,2	81,7	83,8
		Meningkatkan sumber daya manusia KP yang kompeten	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP Kompeten yang terserap di DUDIKA	Indikator baru	75	76	77	78	79
Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan PPK Pembersihan Sampah Plastik di Laut	Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Peningkatan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0-1)	0,40	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61
		Memperkuat penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang laut dan zonasi wilayah pesisir secara partisipatif dan berbasis ekosistem	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	Indikator baru	13,60	34,69	55,78	77,55	100
		Mengurangi jumlah sampah yang masuk kelaut	Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut (%)	Indikator baru	1	40	50	60	70
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	Memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan, pemberantasan korupsi	Memastikan birokrasi yang efektif dan efisien melalui **digitalisasi** yang berorientasi pada pelayanan publik prima	Indeks Reformasi Birokrasi	91,70	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25

2

c. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah **“Meningkatkan pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan”.**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya luasan mangrove yang direhabilitasi
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perikanan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perikanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perikanan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Perturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142) dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.13
Tabel Indikasi Program

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan												Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011 - 2015	2016 - 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
II	PERWUJUDAN POLA RUANG															
A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG															
1	Kawasan perlindungan setempat;	Rencana sempadan pantai meliputi : - perlindungan garis pantai; - penghijauan sempadan pantai dalam rangka mendukung RTH Kota.													APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Kemen Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
	Rencana reklamasi perairan (P/SS)	Rencana sempadan pantai meliputi : - perlindungan garis pantai; - penghijauan sempadan pantai dalam rangka mendukung RTH Kota.													APBN APBD	Kementerian PUPR, Kemen Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan,

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan													Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011 - 2015	2016 - 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																	Distaru, Dinas PU
		Rencana kawasan sempadan sungai meliputi: - perlindungan dan penguatan dinding sungai; - penghijauan sempadan sungai; dan - pengembangan jalan inspeksi tepi sungai														APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
		Rencana kawasan sekitar waduk dan embung meliputi: - perlindungan dan penguatan dinding pembatas waduk dan embung; - penghijauan sempadan waduk dan embung; dan - pengembangan jalan inspeksi di sekeliling waduk dan embung														APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
2	Ruang terbuka hijau;	- Penambahan RTH menuju 20% melalui: - Pembangunan taman dan lapangan - Penghijauan jalur jalan - Penghijauan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk/ embung. - Pengijauan pemakaman - Peningkatan kualitas RTH														APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
	Perencanaan reklamasi perairan (P/RTH)	Penambahan RTH menuju 20% melalui: - Pembangunan taman - Penghijauan jalur jalan - Penghijauan kawasan sempadan														APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan,

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan													Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2	PJM-3						PJM-4						
			2011 - 2015	2016 - 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		pantai, Peningkatan kualitas RTH															Distaru, Dinas PU
3	Kawasan Perikanan																
	Pengembangan dan peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan	Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu														APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengembangan budidaya perikanan tambak	Kecamatan Tugu														APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Ruang Terbuka Non Hijau																
	Perencanaan reklamasi Perairan (P/RTNH)	Kecamatan Tugu														APBN APBD Prov APBD Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU, Sawasta

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Perikanan. Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Dinas Perikanan tidak dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Perikanan adalah terkait “Isu Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

Tabel 2.14
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Isu Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Isu Lingkungan Hidup Isu Hasil Konsultasi Publik dan Dokumen Kebijakan Strategis Lainnya	1. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
	2. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender
	3. Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah
	4. Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim
	5. Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi
	6. Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan
	7. Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab

Tabel 2.15
Indikator Isu Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029
Dinas Perikanan

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
	NIHIL								

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

f. Telaahan Dokumen Lainnya

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perikanan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Renstra, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Perikanan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Isu Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya	Belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana	Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Isu Ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi masih relatif rendah	Produksi dan konsumsi berkelanjutan	Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social	Sarpras	Penurunan tingkat kemiskinan
Pengawasan aktivitas perikanan	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan	Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Politik dan Tata Pemerinta han	Ketahanan pangan yang berkelanjutan
	Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove)	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis	Produksi dan konsumsi berkelanjutan	Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran,	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
		Teknologi Informasi		konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		
			Infrastruktur			
			Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja			
			Gender			
			Pendidikan			
			Kemiskinan			

Sumber : Renstra Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

1	Potensi kelebihan dari daerah
2	Permasalahan perangkat daerah yang terdapat di tabel 2.7
3	Isu KLHS yang terdapat di tabel 2.8
4	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang bersifat global yang relevan dengan urusan
5	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang level nasional yang relevan dengan urusan
6	Isu yang terdapat dokumen RPJMD Provinsi/Kab/Kota yang relevan dengan urusan
7	Hasil analisis isu strategis urusan

2.2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG) & Anggaran Responsif Gender (ARG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Tujuan PUG untuk mengurangi kesenjangan gender, menghapuskan diskriminasi, dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah bagaimana anggaran pembangunan ditelaah dan dialokasikan secara responsive untuk memenuhi kebutuhan Perempuan dan laki – laki sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak.

Tujuan ARG memastikan manfaat pembangunan terdistribusi secara adil, serta meningkatkan aktivitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan.

2.2.5 Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak (KLA) adalah sebuah sistem pembangunan wilayah administrasi yang menjamin hak – hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan.

Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak, serta memastikan pemenuhan hak – hak anak termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan khusus.

Penilaian Kota Layak Anak (KLA) didasarkan pada 24 indikator yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster hak anak, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan: hak anak untuk berekspresi dan berpartisipasi
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: ketersediaan lingkungan keluarga yang kondusif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan: hak anak atas akses pelayanan kesehatan dan lingkungan yang sehat
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya: hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan ruang untuk bermain dan berkreasi
5. Perlindungan khusus: perlindungan bagi anak – anak yang rentan, seperti anak jalanan, anak dengan disabilitas, dan anak yang mengalami eksploitasi.

2.2.6 Pengentasan Kemiskinan

Serangkaian tindakan ekonomi dan kemanusiaan yang bertujuan untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen, yang meliputi peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Pada Dinas Perikanan Kota Semarang, langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk Pengentasan Kemiskinan dapat dilakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Pemberian pelatihan kepada pelaku usaha perikanan kecil dan menengah untuk meningkatkan kemampuan serta meningkatkan hasil produksi perikanan.
2. Pemberian bantuan kepada pelaku usaha perikanan kecil dan menengah yang berupa sarana dan prasarana produksi perikanan
3. Pemberian Asuransi kepada Nelayan

2.2.7 Penurunan Stunting

Penurunan stunting adalah upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk mengurangi angka balita pendek dan sangat pendek di Kota Semarang dengan fokus pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak usia 2 (dua) tahun. Upaya ini mencakup intervensi spesifik seperti memastikan gizi ibu hamil dan anak, imunisasi lengkap, serta intervensi sensitif seperti sanitasi, penyediaan air bersih, dan pola asuh yang tepat.

Dinas Perikanan Kota Semarang juga ikut mendukung program Penurunan Stunting di Kota Semarang dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan dasar ikan untuk balita stunting di Kota Semarang.

2.2.8 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang setiap saat, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, beragam, bergizi, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan nilai agama dan budaya masyarakat, sehingga memungkinan hidup sehat dan produktif. Yang mencakup 4 (empat) pilar utama, yaitu: ketersediaan pangan, akses pangan, penyerapan atau pemanfaatan pangan, dan stabilitas ketersediaan pangan.

Pada Dinas Perikanan Kota Semarang, langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk program Ketahanan Pangan dapat dilakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber)
2. Pelatihan Budidaya Ikan dalam Kolam Terpal
3. Pelatihan Pembenihan Ikan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Perikanan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perikanan Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perikanan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Perikanan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimategoal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perikanan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perikanan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan Dinas Perikanan: “Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan”.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan dan kelautan
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa	Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan		Nilai produksi perikanan dan kelautan	Rupiah	-	100.000.000	102.000.000	104.000.000	106.000.000	108.000.000	-
		Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan dan kelautan	Nilai produksi perikanan tangkap	Rupiah	-	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	-
			Nilai produksi perikanan budidaya	Rupiah	-	80.000.000	81.000.000	82.000.000	83.000.000	84.000.000	-
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan	Angka	78,80	78,81	78,82	78,83	78,84	78,85	-
			Indeks kepuasan masyarakat Dinas Perikanan	Angka	81,59	81,60	81,61	81,62	81,63	81,64	-

Keterangan :

19	Sasaran dalam dokumen RPJMD yang dapat didukung oleh PD terkait
20	Tujuan PD minimal 1 kalimat tujuan
21	Sasaran Perangkat Daerah
22	Indikator tujuan maupun sasaran
23	Satuan dari indikator
24	Target indikator
25	Target indikator
26	Target indikator
27	Target indikator
28	Target indikator
29	Target indikator
30	Dapat diisi definisi operasional atau rumus indikator

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perikanan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Perikanan dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Startegi
Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029

KETERANGAN	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana	Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan	Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan	Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan
Pengawasan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi	Penguatan kebijakan dan kebijakan	Pemantauan dan monitoring	Rehabilitasi dan restorasi ekosistem	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat
Produksi pembudidayaan ikan	Penumbuhan sentra budidaya perikanan	Pembangunan demplot dan sarpras pendukung sentra budidaya ikan	Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana	Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan budidaya ikan	Pengelolaan budidaya ikan yang berkelanjutan
Hilirisasi produk usaha kecil pembudidayaan ikan	Identifikasi potensi produk perikanan	Peningkatan kualitas dan keamanan produk	Peningkatan hilirisasi produksi perikanan (Fasilitasi kualitas	Pengembangan kemitraan dan jaringan	Pemasaran dan branding

KETERANGAN	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
		perikanan	produk seperti Halal, PIRT, MD, HACCP)		

3.2.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perikanan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perikanan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perikanan.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Perikanan Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1.	Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa	Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dengan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	
		Peningkatan ekosistem kewirausahaan melalui inkubasi bisnis dan kemitraan strategis	Pemberdayaan Nelayan Kecil	
		Pengembangan ekonomi kreatif dan digital, termasuk talenta digital muda	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
		Penyediaan pelatihan kerja berbasis industri dan kebutuhan pasar tenaga kerja	Optimalisasi aktivitas pelaku usaha perikanan	
		Penataan kawasan ekonomi strategis dan destinasi wisata berbasis kearifan lokal	Peningkatan sarana Pembenihan Perikanan Budidaya	
			Peningkatan prasarana Teknologi Perikanan Budidaya	
			Peningkatan kualitas air Pembudidayaan Ikan	
			Optimalisasi pendampingan Pembudidayaan Ikan	
			Peningaktan kualitas Pemasaran Hasil Budidaya Ikan	
			Peningkatan kualitas standarisasi produk Usaha Perikanan Budidaya	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perikanan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME / SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa	Tujuan: Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan				Indikator Tujuan: Nilai produksi perikanan dan kelautan (rupiah)		
		Sasaran: Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan dan kelautan Indikator Sasaran: Nilai produksi perikanan tangkap (rupiah)	Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Eselon III / Kepala Bidang Perikanan Tangkap
				Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terkelola	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Eselon IV / Subkoor Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME / SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Staf
				Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Eselon IV / Subkoor Pemberdayaan Nelayan Kecil
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Staf
				Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Persentase Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Eselon IV / Subkoor Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Staf
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati		Luasan Kawasan Konservasi	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Eselon III / Kepala Bidang Perikanan Tangkap
				Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Eselon IV / Subkoor Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap
				Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Staf
		Indikator Sasaran: Nilai produksi perikanan budidaya (rupiah)	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Eselon III / Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
				Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Eselon IV / Subkoor Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME / SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Staf
				Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Prasarana Pembudidayaan Ikan yang Terkelola	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Eselon IV / Subkoor Pembenihan Perikanan Budidaya
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Staf
				Meningkatnya pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan	Persentase unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Eselon IV / Subkoor Pengembangan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
				Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk PembudidayaanIkan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Staf
			Meningkatnya preferensi masyarakat akan konsumsi pangan bergizi berbasis ikan		Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Eselon III / Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
				Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Eselon IV / Subkoor Pembinaan Pembudidayaan Ikan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME / SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanansesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Staf
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Eselon IV / Subkoor Pembinaan Pemasaran Hasil Budidaya Ikan
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Staf
				Meningkatnya kualitas standarisasi produk Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan kualitas standarisasi produk Usaha Perikanan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Eselon IV / Subkoor Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan SkalaMikrodan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Staf
		Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan Indikator Sasaran: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perikanan yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Eselon III / Sekretaris Dinas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME / SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Eselon IV / Subkoor / Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf
				Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Staf
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Staf
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Staf
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Staf
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Eselon IV / Subkoor / Kasubag Perencanaan, Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME / SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
							& Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf
		Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Eselon III / Sekretaris Dinas
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perikanan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perikanan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Eselon IV / Subkoor / Kasubag Umum & Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME / SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perikanan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Eselon IV / Subkoor / Kasubag Umum & Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Staf
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Eselon IV / Subkoor / Kasubag Umum & Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME / SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perikanan yang selesai ditindaklanjuti	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Eselon IV / Subkoor / Kasubag Umum & Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staf
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perikanan sesuai ketentuan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Eselon IV / Subkoor / Kasubag Umum & Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME / SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf

Perangkat Daerah Dinas Perikanan Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan serta Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1.	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-
2.	Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	-

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perikanan Kota Semarang

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					14.423.203.139		16.006.454.937		16.695.559.815		16.822.138.588		17.120.711.702
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN					14.423.203.139		16.006.454.937		16.695.559.815		16.822.138.588		17.120.711.702
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.650.263.513		1.824.854.173		1.900.844.155		1.914.802.435		1.947.727.126
Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	3.115,94	3.201	1.650.263.513	3.233	1.824.854.173	3.265	1.900.844.155	3.297	1.914.802.435	3.329	1.947.727.126
3.25.03.2.01 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					500.000.000		600.000.000		625.000.000		630.000.000		640.000.000
Output: Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terkelola	%	100	100	500.000.000	100	600.000.000	100	625.000.000	100	630.000.000	100	640.000.000
3.25.03.2.01.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					500.000.000		600.000.000		625.000.000		630.000.000		640.000.000
Output: Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	30	50	500.000.000	50	600.000.000	50	625.000.000	50	630.000.000	50	640.000.000
3.25.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota					500.000.000		600.000.000		625.000.000		630.000.000		640.000.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Output: Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	%	100	100	500.000.000	100	600.000.000	100	625.000.000	100	630.000.000	100	640.000.000
3.25.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					500.000.000		600.000.000		625.000.000		630.000.000		640.000.000
Output: Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	100	500.000.000	100	600.000.000	100	625.000.000	100	630.000.000	100	640.000.000
3.25.03.2.03 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					650.263.513		624.854.173		650.844.155		654.802.435		667.727.126
Output: Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Persentase Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	%	100	100	650.263.513	100	624.854.173	100	650.844.155	100	654.802.435	100	667.727.126
3.25.03.2.03.0002 Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					650.263.513		624.854.173		650.844.155		654.802.435		667.727.126
Output: Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	1	650.263.513	1	624.854.173	1	650.844.155	1	654.802.435	1	667.727.126
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					170.681.113		188.738.428		196.597.812		198.041.469		201.446.757
Outcome: Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	hektar	-	0,50	170.681.113	0,50	188.738.428	0,50	196.597.812	0,50	198.041.469	0,50	201.446.757
3.25.05.2.01 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota					170.681.113		188.738.428		196.597.812		198.041.469		201.446.757

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Output: Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	%	100	100	170.681.113	100	188.738.428	100	196.597.812	100	198.041.469	100	201.446.757
3.25.05.2.01.0011 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan					170.681.113		188.738.428		196.597.812		198.041.469		201.446.757
Output: Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Unit	1	1	170.681.113	1	188.738.428	1	196.597.812	1	198.041.469	1	201.446.757
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.313.626.110		3.664.193.255		3.816.776.395		3.844.803.749		3.910.914.474
Outcome: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton/tahun	3.961,42	4.120	3.313.626.110	4.161	3.664.193.255	4.202	3.816.776.395	4.244	3.844.803.749	4.286	3.910.914.474
3.25.04.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					650.000.000		700.000.000		750.000.000		760.000.000		800.000.000
Output: Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	%	100	100	650.000.000	100	700.000.000	100	750.000.000	100	760.000.000	100	800.000.000
3.25.04.2.02.0004 Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					650.000.000		700.000.000		750.000.000		760.000.000		800.000.000
Output: Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,	Kelompok	10	10	650.000.000	10	700.000.000	10	750.000.000	10	760.000.000	10	800.000.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												
3.25.04.2.04 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					2.663.626.110		2.964.193.255		3.066.776.395		3.084.803.749		3.110.914.474
Output: Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Prasarana Pembudidayaan Ikan yang Terkelola	%	100	100	1.813.626.110	100	2.064.193.255	100	2.116.776.395	100	2.124.803.749	100	2.130.914.474
3.25.04.2.04.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					1.813.626.110		2.064.193.255		2.116.776.395		2.124.803.749		2.130.914.474
Output: Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Unit	4	1	1.813.626.110	1	2.064.193.255	1	2.116.776.395	1	2.124.803.749	1	2.130.914.474
3.25.04.2.04 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					2.663.626.110		2.964.193.255		3.066.776.395		3.084.803.749		3.110.914.474
Output: Meningkatnya pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan	Persentase unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan	%	100	100	850.000.000	100	900.000.000	100	950.000.000	100	960.000.000	100	980.000.000
3.25.04.2.04.0011 Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat					850.000.000		900.000.000		950.000.000		960.000.000		980.000.000
Output: Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk PembudidayaanIkan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk	Unit	4	1	850.000.000	1	900.000.000	1	950.000.000	1	960.000.000	1	980.000.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	pembudidayaan ikan												
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.685.785.284		1.864.133.992		1.941.759.651		1.956.018.381		1.989.651.774
Outcome: Meningkatnya preferensi masyarakat akan konsumsi pangan bergizi berbasis ikan	Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/kapita/tahun	-	16	1.685.785.284	16,5	1.864.133.992	17	1.941.759.651	17,5	1.956.018.381	18	1.989.651.774
3.25.06.2.02 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					500.000.000		585.000.000		620.000.000		625.000.000		640.000.000
Output: Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	100	100	500.000.000	100	585.000.000	100	620.000.000	100	625.000.000	100	640.000.000
3.25.06.2.02.0002 Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					500.000.000		585.000.000		620.000.000		625.000.000		640.000.000
Output: Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanansesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan	Unit Usaha	15	5	500.000.000	5	585.000.000	5	620.000.000	5	625.000.000	5	640.000.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan												
3.25.06.2.03 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					1.185.785.284		1.279.133.992		1.321.759.651		1.331.018.381		1.349.651.774
Output: Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	%	100	100	1.185.785.284	100	1.279.133.992	100	1.321.759.651	100	1.331.018.381	100	1.349.651.774
3.25.06.2.03.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					685.785.284		694.133.992		701.759.651		706.018.381		709.651.774
Output: Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalan 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalan 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Ton / tahun	17.802,22	17.887,95	685.785.284	17.959,50	694.133.992	18.067,25	701.759.651	18.211,80	706.018.381	18.393,91	709.651.774
3.25.06.2.03 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					1.185.785.284		1.279.133.992		1.321.759.651		1.331.018.381		1.349.651.774
Output: Meningkatnya kualitas standarisasi produk Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan kualitas standarisasi produk Usaha Perikanan	%	100	100	1.185.785.284	100	1.279.133.992	100	1.321.759.651	100	1.331.018.381	100	1.349.651.774

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.25.06.2.03.0002 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					500.000.000		585.000.000		620.000.000		625.000.000		640.000.000
Output: Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan SkalaMikrodanKecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	15	10	500.000.000	10	585.000.000	10	620.000.000	10	625.000.000	10	640.000.000
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.602.847.119		8.464.535.089		8.839.581.802		8.908.472.554		9.070.971.571
Outcome: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perikanan yang berkualitas	%	100	100	7.602.847.119	100	8.464.535.089	100	8.839.581.802	100	8.908.472.554	100	9.070.971.571
3.25.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000
Output: Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	%	100	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000
3.25.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	500.000	8	500.000	8	500.000	8	500.000	8	500.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.25.01.2.01.0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Output: Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
3.25.01.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Output: Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
3.25.01.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Output: Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
3.25.01.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Output: Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD												
3.25.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
3.25.01.2.01.0008 Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
3.25.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.689.847.119		5.974.214.680		6.286.581.802		6.535.472.554		6.867.971.571
Output: Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	%	100	100	5.689.847.119	100	5.974.214.680	100	6.286.581.802	100	6.535.472.554	100	6.867.971.571
3.25.01.2.02.0001 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.460.064.305		5.732.714.680		6.018.994.046		6.319.583.816		6.635.199.475
Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	30	30	5.460.064.305	30	5.732.714.680	30	6.018.994.046	30	6.319.583.816	30	6.635.199.475
3.25.01.2.02.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					228.282.814		240.000.000		266.087.756		214.388.738		231.272.096

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Output: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	228.282.814	1	240.000.000	1	266.087.756	1	214.388.738	1	231.272.096
3.25.01.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Output: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
3.25.01.2.02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	12	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
3.25.01.2.02.0008 Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Output: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	%	90	90,50		90,75		91		91,25		91,50	
Outcome: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	%	90	90,50		90,75		91		91,25		91,50	
3.25.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Output: Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perikanan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perikanan	Nilai	81,58	81,60	100.000.000	81,61	100.000.000	81,62	100.000.000	81,63	100.000.000	81,64	100.000.000
3.25.01.2.05.0003 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
3.25.01.2.05.00011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.25.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					380.000.000		477.320.409		600.000.000		350.000.000		450.000.000
Output: Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perikanan	%	100	100	380.000.000	100	477.320.409	100	600.000.000	100	350.000.000	100	450.000.000
3.25.01.2.06.0003 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
3.25.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
3.25.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
3.25.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
3.25.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000		120.000.000		200.000.000		100.000.000		150.000.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	200.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000
3.25.01.2.06.0011 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					100.000.000		157.320.409		200.000.000		50.000.000		100.000.000
Output: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100.000.000	1	157.320.409	1	200.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000
3.25.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					125.000.000		500.000.000		200.000.000		450.000.000		150.000.000
Output: Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	%	100	100	125.000.000	100	500.000.000	100	200.000.000	100	450.000.000	100	150.000.000
3.25.01.2.07.0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
3.25.01.2.07.0002 Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-		350.000.000		-		350.000.000		-
Output: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Unit	-	-	-	1	350.000.000	-	-	1	350.000.000	-	-

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	atau Lapangan yang Disediakan												
3.25.01.2.07.0010 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					75.000.000		100.000.000		150.000.000		50.000.000		100.000.000
Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000
3.25.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					775.000.000		880.000.000		1.020.000.000		940.000.000		970.000.000
Output: Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perikanan yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	775.000.000	100	880.000.000	100	1.020.000.000	100	940.000.000	100	970.000.000
3.25.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					200.000.000		220.000.000		250.000.000		260.000.000		280.000.000
Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	200.000.000	1	220.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000	1	280.000.000
3.25.01.2.08.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					75.000.000		100.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000
Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Laporan	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Kantor yang Disediakan												
3.25.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					500.000.000		560.000.000		570.000.000		580.000.000		590.000.000
Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	500.000.000	1	560.000.000	1	570.000.000	1	580.000.000	1	590.000.000
3.25.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					480.000.000		480.000.000		580.000.000		480.000.000		480.000.000
Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perikanan sesuai ketentuan	%	100	100	480.000.000	100	480.000.000	100	580.000.000	100	480.000.000	100	480.000.000
3.25.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
3.25.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000
3.25.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Output: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000
3.25.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000		50.000.000		150.000.000		50.000.000		50.000.000
Output: Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai produksi perikanan dan kelautan (rupiah)	Rupiah	-	100.000.000	102.000.000	104.000.000	106.000.000	108.000.000	-
2.	Nilai produksi perikanan tangkap	Rupiah	-	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	-
3.	Nilai produksi perikanan budidaya	Rupiah	-	80.000.000	81.000.000	82.000.000	83.000.000	84.000.000	-

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan
Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	7.249,54	7.321	7.394	7.467	7.541	7.615	-
2.	Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kapita/Thn	-	16	16,5	17	17,5	18	-
3.	Produksi Ikan Olahan	Ton / Tahun	17.852,25	17.887,95	17.959,50	18.067,25	18.211,80	18.393,91	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penntu arah dan tujuan aparatur Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Perikanan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Perikanan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan.

Permasalahan Dinas Perikanan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Perikanan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Perikanan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Perikanan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Perikanan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

25. DINAS PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang maka Dinas Pertanian Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pertanian, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah melalui Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/0T.140/10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 568);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
33. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;
34. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
37. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025;
38. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
39. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029 (Lembar Daerah tahun 2025 Nomor 8;
42. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun

2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13)

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang pertanian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator

kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Pertanian Kota Semarang adalah membantu Walikota/Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Bidang Penyuluhan;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Bidang Penyuluhan;
6. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan, dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Prasarana dan sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

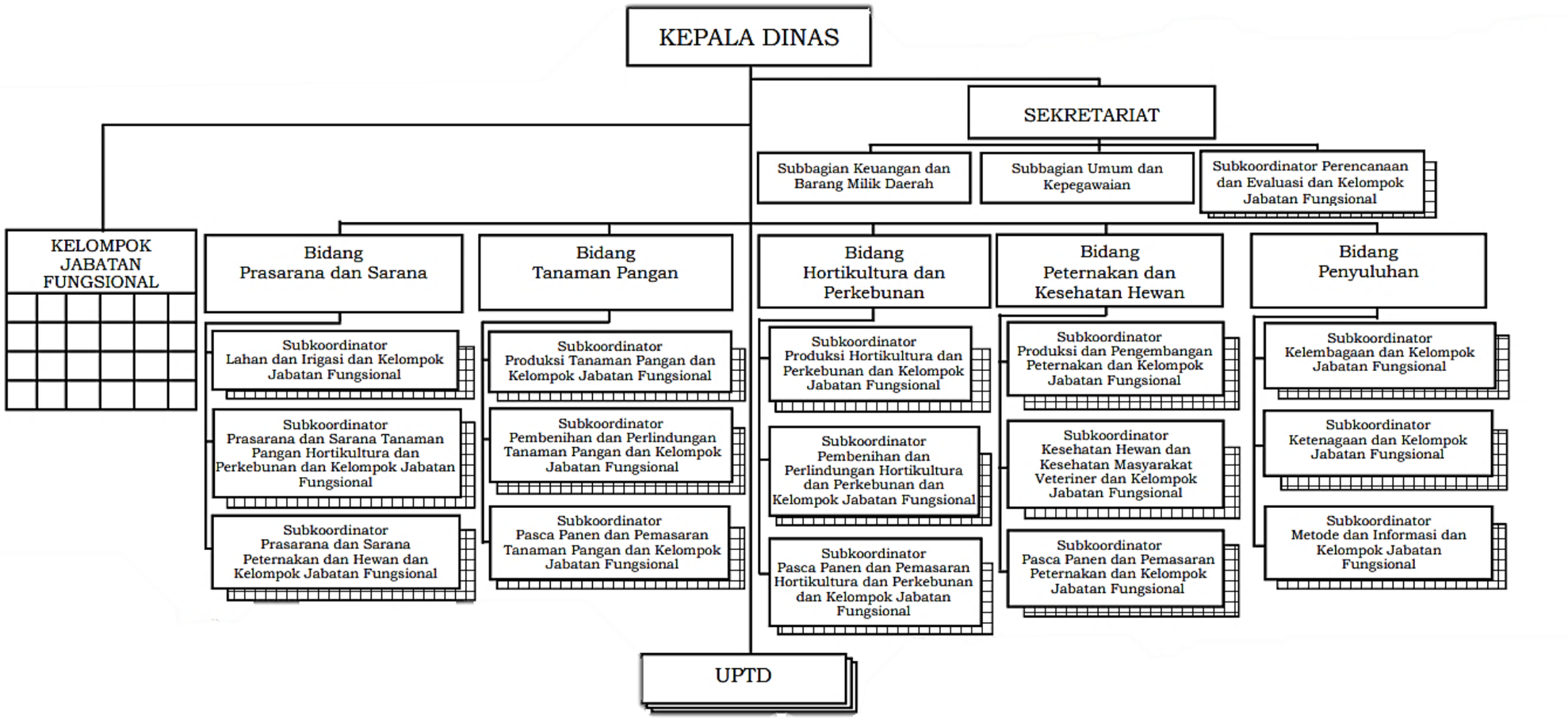

2. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikulturadan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan, dan UPTD. Sekretariat terdiri atas:
   1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   3) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi.
3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Lahan dan Irigasi, Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan hewan. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:
   1) Subkoordinator Lahan dan Irigasi;
   2) Subkoordinator Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
   3) Subkoordinator Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Produksi Tanaman Pangan, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, dan Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan. Bidang Tanaman Pangan terdiri atas:
   1) Subkoordinator Produksi Tanaman Pangan;
   2) Subkoordinator Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
   3) Subkoordinator Pascapanen dan Pemasaran Tanaman Pangan.
5. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Produksi Hortikultura dan Perkebunan, Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan, dan Pasca Panen dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan. Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
   1) Subkoordinator Produksi Hortikultura dan Perkebunan;
   2) Subkoordinator Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan; dan
   3) Subkoordinator Pascapanen dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan.
6. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Produksi dan Pengembangan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan

Pasca Panen dan Pemasaran Peternakan. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
1) Subkoordinator Produksi dan Pengembangan Peternakan;
2) Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
3) Subkoordinator Pascapanen dan Pemasaran Peternakan.

7. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Kelembagaan, Ketenagaan, serta Metode dan Informasi. Bidang Penyuluhan terdiri atas:
   1) Subkoordinator Kelembagaan;
   2) Subkoordinator Ketenagaan; dan
   3) Subkoordinator Metode dan Informasi.
8. Kepala UPTD Kebun Dinas

   UPTD Kebun Dinas telah berubah menjadi UPTD Agrobisnis dan memiliki susunan organisasi, tugas dan fungsi serta sistem kerja tersendiri. Hal ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Agrobisnis pada Dinas Pertanian Kota Semarang. UPTD Agrobisnis mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertanian yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi pengelolaan lahan pertanian, kandang, ternak, laboratorium kultur jaringan, dan outlet. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Agrobisnis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

   a) Penyusunan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Anggaran;
   b) Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Operasional UPTD Agrobisnis;
   c) Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Operasional UPTD Agrobisnis;
   d) Pelaksanaan Pengelolaan Operasional UPTD Agrobisnis;
   e) Penyusunan Kebijakan Teknis Budidaya, Pola Tanam Dan Usaha Tani Tanaman Pada Lahan Pertanian Dinas Pertanian;
   f) Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Peternakan Dinas Pertanian;
   g) Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pelaporan Hasil Kebun Pada UPTD Agrobisnis;
   h) Pelaksanaan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Taman Agro Dan Taman Pembelajaran Pertanian;
   i) Pelaksanaan Penyediaan Tempat Magang Dan Pelatihan Bagi Para Petani Atau Masyarakat;
   j) Pelaksanaan penyediaan pohon induk untuk pengembangan perbenihan tanaman;
   k) Pelaksanaan kegiatan pelayanan benih dan bibit tanaman kepada petani atau masyarakat;
   l) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lahan dan komoditas;
   m) Pelaksanaan pengembangan lahan Dinas Pertanian;
   n) Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah kebun Dinas Pertanian;
   o) Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman lahan Dinas Pertanian;
   p) Pelaksanaan promosi produk hasil UPTD Agrobisnis;
   q) Pelaksanaan penjualan hasil pertanian UPTD Agrobisnis;
   r) Pelaksanaan pengembangan agrowisata pada kebun Dinas Pertanian;

s) Pelaksanaan pemberian pelayanan agrobisnis kepada petani dan masyarakat meliputi pelayanan:
   (1) Konsultasi pertanian;
   (2) Kunjungan edukasi dan pelatihan pertanian;
   (3) Magang/praktek kerja lapangan/penelitian di UPTD agrobisnis;
   (4) Pemasaran produk pertanian;
   (5) Pembagian bibit tanaman kepada masyarakat;
   (6) Pinjam tempat pada UPTD agrobisnis; dan
   (7) Petik buah di UPTD agrobisnis;
t) Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke kas daerah;
u) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan pengelolaan lahan pada UPTD agrobisnis;
v) Pelaksanaan ketatausahaan UPTD agrobisnis;
w) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD agrobisnis; dan
x) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pertanian Kota Semarang di klasifikasikan berdasarkan pendidikan dan berdasarkan golongan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang per akhir Agustus 2025 sejumlah 140 orang ASN yang terdiri dari 80 orang PNS dan 60 orang P3K. Rincian pegawai Dinas Pertanian dapat dikategorikan sebagai berikut: Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	6	2	8
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	1	-	19	2	22
3	D3	7	7	2	1	17
4	D4	-	1	-	-	1
5	S1	14	30	15	13	72
6	S2	6	14	-	-	20
7	S3	-	-	-	-	-

Dari jumlah pegawai sebanyak 140 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	7	7	14
2	Golongan III	18	39	57
3	Golongan IV	3	6	9

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Aset Tanah Dinas Pertanian Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.1963											
1	Tanah Sawah Irigasi	18.520,00	1963	RW I Cepoko, Jalan Kandri Barat, Cepoko, Gunungpati, Semarang	Hak Pakai			Pertanian	Pembelian	436.500,00	P. 69 Kel.Cepoko - Ex-Bengkok - 50.13.11.00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.1976											
1	Tanah Usaha	9.596,00	1976	Agro Purwosari RT 01 RW 03 / P.121, Kec. Mijen.	Hak Pakai	30/04/2007	HP 30	Sawah	Pembelian	191.920,00	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.1981											
1	Tanah Sawah Irigasi	7.150,00	1981	RW IX Nglarang, dekat lapangan Sepakbola Sangkal	Hak Pakai			JSDF	Pembelian	105.150,00	P. 255/Bekel Sisangkal - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
2	Tanah Sawah Irigasi	5.699,00	1981	RW IX Nglarang/Pandean	Hak Pakai			Lelang	Pembelian	100.040,00	P. 256/S Bengkok Bekel VII Sisangkal - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
3	Tanah Sawah Irigasi	6.800,00	1981	RW X Siroto, Jalan Raya Malon, Gunungpati (arah ke Ungaran)	Hak Pakai			JSDF	Pembelian	102.000,00	P. 213/S Bengkok/Bekel X Siroto - Lain-Lain - 50.13.14.00
4	Tanah Sawah Irigasi	9.400,00	1981	Abimanyu RW VI Malon, Jalan Raya Malon, Gunungpati (dekat Tiang Sutet)	Hak Pakai			Pertanian	Pembelian	127.000,00	P. 204/S Bengkok Bekel X/ Abimanyu - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
5	Tanah Sawah Irigasi	6.700,00	1981	Siblimbing RW I, Jalan Krajan Raya, Pakintelan, Gunungpati	Hak Pakai			Pertanian	Pembelian	321.600,00	- Ex-Bengkok - 50.13.07.00
6	Tanah Sawah Irigasi	600,00	1981	Sisabuk RW III, Jalan Krajan Raya, Pakintelan, Gunungpati	Hak Pakai			Pertanian	Pembelian	288.000,00	- Ex-Bengkok - 50.13.07.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
7	Tanah Sawah Irigasi	3.000,00	1981	Sileboh RW III, Gang Janjung, Pakintelan, Gunungpati	Hak Pakai			Pertanian	Pembelian	144.000,00	- Ex-Bengkok - 50.13.07.00
8	Tanah Sawah Irigasi	1.440,00	1981	Sitrombo RW I, Jalan Krajan Raya, Pakintelan, Gunungpati	Hak Pakai			Pertanian	Pembelian	691.200,00	- Ex-Bengkok - 50.13.07.00
9	Tanah Sawah Irigasi	9.809,00	1981	Kamituwo, RT 2 RW I Nongkosawit (dekat lapangan sidosari)	Hak Pakai	28/04/2016	HP 18	JSDF /Pertanian	Pembelian	1.124.000,00	P. 10 /S III Bengkok Kamituwo - Ex-Bengkok - 50.13.12.00
10	Tanah Sawah Irigasi	2.262,00	1981	Randusari RT 01 RW II Nongkosawit	Hak Pakai	28/04/2016	HP 11	Lap Volly, taman, Fasum	Pembelian	231.000,00	P. 60/S II Bengkok UPTD - Ex-Bengkok - 50.13.12.00
11	Tanah Sawah Irigasi	4.672,00	1981	Jalan Randusari, RT 1 RW II Nongkosawit (Lapangan Baturan Randusari)	Hak Pakai	28/04/2016	HP 13	JSDF	Pembelian	200.000,00	P 70 /S II - Ex-Bengkok Bekel - 50.13.12.00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.1985											
1	Tanah Kebun Induk	7.605,00	1985	Jl. Raya Ungaran Gunungpati, Dukuh Bengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati	Hak Pakai	19/04/1985	01	Kebun buah-buahan	Pembelian	304.000,00	Kebun dinas
2	Tanah Usaha	80.930,00	1985	Jl. Raya Semarang Kendal, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan	Hak Pakai	29/04/1985	06	Kebun buah-buahan	Pembelian	12.628.800,00	Tanah digunakan oleh Dinas pariwisata sebagai kebun binatang mangkang
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.1996											
1	Tanah Usaha	2.125,00	1996	Agro Purwosari, RT 01 RW 03 / P.1199, Kec Mijen	Hak Pakai	30/04/2007	HP 130	Sawah	Pembelian	42.500,00	Ex Bengkok an. Jasiyah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2000											
1	Tanah Sawah Irigasi	7.048,00	2000	RT 02 RW I Nongkosawit, (BAYAN)	Hak Pakai	28/04/2016	HP 08	JSDF	Pembelian	675.000,00	P. 11 /S. II Bengkok Bayan - Ex-Bengkok - 50.13.12.00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2001											
1	Tanah Bangunan Poliklinik	1.300,00	2001	Jl. Slamet Riyadi No. 4 B, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang	Hak Pakai			Pelayanan kesehatan hewan	Pembelian	390.000,00	Klinik Hewan
2	Tanah Bangunan Karantina	4.320,00	2001	Jl. Raya Gunungpati, Kel. Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	Hak Pakai			Puskeswan	Pembelian	259.200,00	Puskeswan
3	Tanah Kebun Induk	4.560,00	2001	Agro Purwosari, RT.01, RW.03, Kel. Purwosari, Kec. Mijen	Hak Pakai			Kebun buah2an	Pembelian	912.000,00	Kebun dinas
4	Tanah Kebun Induk	58.190,00	2001	Jl. Durian RT.05, RW.02, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Kebun buah2an	Pembelian	1.163.800,00	BPP dan Kebun dinas
5	Tanah Kebun Induk	27.300,00	2001	Jl. Cepoko Raya, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati	Hak Pakai			Kebun buah2an	Pembelian	546.000,00	Kebun dinas
6	Tanah Kebun Induk	1.520,00	2001	Jl. Raya Gunungpati, Jalan Nongkosawit Raya, Kel. Nongkosawit, Kec. Gunungpati	Hak Pakai			Kebun buah2an	Pembelian	304.000,00	Kebun dinas
7	Tanah Usaha	8.476,00	2001	Jl. Raya Gunungpati, Kel. Gunungpati, Kec. Gunungpati	Hak Pakai			Kebun buah2an	Pembelian	524.760,00	BPP dan Kebun dinas
8	Tanah Usaha	9.300,00	2001	Jalan Amarta, Taman Herbal Cangkiran, Kel. Cangkiran, Kec. Mijen	Hak Pakai			Sawah	Pembelian	186.000,00	Kebun dinas/sawah

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
9	Tanah Usaha	30.000,00	2001	Jl. Raya Semarang Kendal, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan	Hak Pakai			Kebun buah2an	Pembelian	3.966.000,00	Taman edukasi lalu lintas
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2007											
1	Tanah Sawah Irigasi	12.832,00	2007	Mangunsari/RT 02/RW4, Jalan Dukuh Mranggen, sebelah selatan Lapangan Mranggen	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 06	Pertanian	Pembelian	48.000,00	Kel. Mangunsari - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
2	Tanah Kebun Induk	7.300,00	2007	Kp. Rowo, Persil 128, Jalan Mekarsari Raya, Rowosari, Tembalang	Hak Pakai	04/07/2007	HP 17	kebun	Pembelian	233.500,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
3	Tanah Kebun Induk	7.500,00	2007	Kp. Rowotengah, Persil 126, Jalan Mekarsari Raya, Rowosari, Tembalang	Hak Pakai	04/07/2007	hp 15	kebun	Pembelian	238.100,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
4	Tanah Kebun Induk	10.890,00	2007	Kp. Rowo, Persil 125, Jalan Mekarsari Raya, Rowosari, Tembalang	Hak Pakai	04/07/2007	HP 14	Tanah kebun	Pembelian	335.100,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
5	Tanah Kebun Induk	12.770,00	2007	Dk. Rowotengah, persil 123, Jalan Mekarsari Raya, Rowosari, Tembalang	Hak Pakai	04/07/2007	HP 13	Tanah kebun	Pembelian	377.500,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
6	Tanah Kebun Induk	10.230,00	2007	Kp. Rowo, Persil 124, Jalan Mekarsari Raya, Rowosari, Tembalang	Hak Pakai	04/07/2007	HP 12	kebun	Pembelian	317.300,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
7	Tanah Kebun Induk	5.760,00	2007	Kp. Rowo, Persil 127, Jalan Mekarsari Raya, Rowosari, Tembalang	Hak Pakai	04/07/2007	HP 16	kebun	Pembelian	188.400,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
8	Tanah Usaha	9.237,00	2007	Jl. RM. Hadi Subeno, Kel. Tambangan, Kec. Mijen.	Hak Pakai	04/07/2007	HP 10	kebun	Pembelian	210.000,00	Kebun dinas

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
9	Tanah Usaha	19.466,00	2007	Jl. RM. Hadi Subeno, Kel. Tambangan, Kec. Mijen	Hak Pakai	08/01/2007	11	kebun	Pembelian	1.092.000,00	BPP, UPTD dan Kebun dinas
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2009											
1	Tanah Usaha	17.307,00	2009	Jl. Mulawarman Raya no 1C, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Kebun buah2an	Pembelian	8.653.500,00	Kebun dinas dan BPP Tembalang
2	Tanah Lapangan Taman lainnya	529,00	2009	Jl Menteri Supeno, Kel Mugassari RT.09 RW.04, UFC	Hak Pakai	24/06/2005	19	Taman Antar SMU 01 & SMK 04	Pembelian	1.673.900,00	Hasil Penilaian Tahun 2009 - Lain-Lain - 50.04.04.00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2010											
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.089,00	2010	Jl. Kompak No. 2-3, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, Semarang	Hak Pakai	29/11/2010	25	Kantor	Pembelian	1.828.000,00	
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2011											
1	Tanah Sawah Irigasi	8.177,00	2011	RW II Sikrangkeng, dekat lapangan Sepakbola Sangkal	Hak Pakai	18/02/2008	HP. 38	JSDF	Pembelian	1.400.000,00	Ps. 264 S II Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
2	Tanah Sawah Irigasi	7.855,00	2011	RW IX Pandean, dekat lapangan sepakbola sangkal	Hak Pakai	31/07/2007	HP. 18	Lelang	Pembelian	99.000,00	P.310/S II Bengkok Bekel VI - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
3	Tanah Sawah Irigasi	7.235,00	2011	RW IX Nglarang, dekat Lapangan Sepakbola Sangkal	Hak Pakai	31/07/2007	HP. 20	Lelang	Pembelian	120.000,00	P. 312/S II Bengkok Bekel VII - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
4	Tanah Sawah Irigasi	4.109,00	2011	RW IX Nglarang/Sisangkal, dekat lapangan Sepakbola Sangkal	Hak Pakai	31/07/2007	HP. 17	JSDF	Pembelian	80.400,00	P. 313/S II Bengkok Bekel VIII - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
5	Tanah Sawah Irigasi	6.920,00	2011	RW IX Nglarang/Sisangkal	Hak Pakai	31/07/2007	HP. 19	Lelang	Pembelian	93.000,00	P. 311/S II Bengkok Bekel IX - Ex-Bengkok - 50.13.14.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
6	Tanah Sawah Irigasi	6.361,00	2011	Kp. Siwogo, Jalan Ungaran Gunungpati, Semarang	Hak Pakai	06/08/2007	HP. 24	JSDF	Pembelian	55.000,00	P. 314/SIII Bondo Deso - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
7	Tanah Sawah Irigasi	4.652,00	2011	RW IX Pandean, Jalan Ungaran Gunungpati, Semarang	Hak Pakai	26/07/2007	HP. 11	JSDF	Pembelian	23.600,00	P. 308/SIII Bengkok Bekel X - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
8	Tanah Sawah Irigasi	1.057,00	2011	RW IX Pandean, Jalan Raudhatul Jannah	Hak Pakai	31/07/2007	HP. 21	JSDF	Pembelian	18.000,00	P. 307/S III Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
9	Tanah Sawah Irigasi	3.199,00	2011	RW IX Pandean, Jalan Raudhatul Jannah, Gunungpati	Hak Pakai	31/07/2007	HP. 16	Lelang	Pembelian	45.000,00	P. 136/S III Bengkok Bekel VI/siketur - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
10	Tanah Sawah Irigasi	6.381,00	2011	Ngrembel, Jalan Jagalan Baru V lurus mentok, dekat Pos PAUD Melati	Hak Pakai	18/02/2008	HP. 30	JSDF	Pembelian	180.000,00	P.56/S II Kepetengan II - Ex-Bengkok - 50.13.14.00
11	Tanah Sawah Irigasi	3.269,00	2011	Pengkol RT.02/I	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 27	Pertanian	Pembelian	25.000,00	P.72/ Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
12	Tanah Sawah Irigasi	11.676,00	2011	Mangunsari RT.03/4, dekat Jalan Raya Pengkol	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 30	Pertanian	Pembelian	45.000,00	Ps.32/Bengkok Carik - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
13	Tanah Sawah Irigasi	11.554,00	2011	Salakaan/ RT.02/V, lapangan mranggen	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 31	Pertanian	Pembelian	60,00	Ps.13 /Bengkok Carik - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
14	Tanah Sawah Irigasi	13.114,00	2011	Sidadap Mangunsari RT.03/4	Hak Pakai	30/04/2007	HP 35	Pertanian	Pembelian	89.000,00	Ps.30/ Bengkok bekel - Ex-Bengkok - 50.13.03.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
15	Tanah Sawah Irigasi	2.934,00	2011	Mranggen RT 01/5, mangunsari	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 45	Pertanian	Pembelian	15.000,00	Ps.108/Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
16	Tanah Sawah Irigasi	4.791,00	2011	Kebonmanis RT/03/3	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 10	Pertanian	Pembelian	18.000,00	P.33/ Bengkok Bayan - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
17	Tanah Sawah Irigasi	3.533,00	2011	Mranggen RT.02/V, Jalan Salakan, Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 24	Pertanian	Pembelian	15.000,00	P.11/ Bengkok Bayan - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
18	Tanah Sawah Irigasi	9.882,00	2011	Mranggen, Mangunsari	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 26	Pertanian	Pembelian	48.000,00	Ps. 27 S IV - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
19	Tanah Sawah Irigasi	4.509,00	2011	Kel Mangunsari	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 37	Pertanian	Pembelian	30.000,00	Ps.120 / Ex Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
20	Tanah Sawah Irigasi	2.509,00	2011	Pagersalam, Mangunsari	Hak Pakai	31/07/2007	HP 38	Pertanian	Pembelian	9.800,00	Ps. 69 S I / Ex Bemgkok Carik - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
21	Tanah Sawah Irigasi	9.118,00	2011	Pagersalam RT.04/II	Hak Pakai	31/07/2007	HP. 41	Pertanian	Pembelian	4.800,00	Ps.1 SII /Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
22	Tanah Sawah Irigasi	9.510,00	2011	Sidadap/TR.03/4 Mangunsari	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 11	Pertanian	Pembelian	57.000,00	P.27/Bondodeso - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
23	Tanah Sawah Irigasi	3.125,00	2011	Salakaan RT 02/V	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 13	Pertanian	Pembelian	9.000,00	P.14/Bengkok Modin - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
24	Tanah Sawah Irigasi	11.983,00	2011	Mangunsari RT.03/4, Jalan Raya Pengkol	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 22	Pertanian	Pembelian	47.000,00	P.31 Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.13.03.00
25	Tanah Sawah Irigasi	7.887,00	2011	Mangunsari RT.03/4	Hak Pakai	30/04/2007	HP. 23	Pertanian	Pembelian	35.000,00	P.28/ Bengkok Lurah - Ex-

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
											Bengkok - 50.13.03.00
26	Tanah Sawah Irigasi	11.456,00	2011	Dk. Puntan RT 01 RW 1, Jalan Wonosari, Ngijo, Gunungpati	Hak Pakai	07/06/2007	HP. 03	Pertanian	Pembelian	54.000,00	Ps.151 S II / Ex Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.13.04.00
27	Tanah Sawah Irigasi	15.419,00	2011	Dk. Setono RT 04/II, Jalan Kyai Asari, Ngijo, Gunungpati	Hak Pakai	07/06/2007	HP. 02	Pertanian	Pembelian	964.000,00	Ps. 63a,S I / Bengkok Carik - Ex-Bengkok - 50.13.04.00
28	Tanah Sawah Irigasi	6.327,00	2011	Dk Setono RT 04/II, Jalan Kyai Asari, Kampoeng Tematik, Ngijo, Gunungpati	Hak Pakai	07/06/2007	HP. 08	Pertanian	Pembelian	344.000,00	Ps. 61 S II / Ex Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.13.04.00
29	Tanah Sawah Irigasi	9.955,00	2011	Dk. Ngijo RT 02/II, Gang Jambu, Jalan Raya Ngijo, Gunungpati	Hak Pakai	07/06/2007	HP. 07	Pertanian	Pembelian	705.000,00	Ps. 61/S II Bengkok Carik - Ex-Bengkok - 50.13.04.00
30	Tanah Sawah Irigasi	25.914,00	2011	Kp. Sedayu, Jalan Mintarsih Barat V & Jalan Kalisegoro Raya, Kalisegoro, Gunungpati	Hak Pakai	24/08/2007	HP. 11	Pertanian	Pembelian	950.000,00	Ps. 44/S I Ex Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.13.17.00
31	Tanah Sawah Irigasi	8.419,00	2011	Kp. Sedayu, Jalan Mintarsih Barat III, Kalisegoro, Gunungpati, Semarang	Hak Pakai	07/06/2007	HP. 08	Pertanian	Pembelian	118.750,00	Ps. 52/S I Ex Bengkok Carik - Ex-Bengkok - 50.13.17.00
32	Tanah Tegalan	3.744,00	2011	Kalisegoro, Jalan Kenteng, Kalisegoro, Gunungpati	Hak Pakai	07/06/2007	HP. 10	Pertanian	Pembelian	195.177,50	Ps. 09 /S III Bengkok Carik Kenteng - Ex-Bengkok - 50.13.17.00
33	Tanah Tegalan	2.587,00	2011	Kalisegoro, Jalan Kenteng, Gunungpati	Hak Pakai	07/06/2007	HP. 02	Pertanian	Pembelian	126.777,50	Ps. 27 /S II Bengkok Modin - Ex-Bengkok - 50.13.17.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
34	Tanah Kebun Induk	3.337,00	2011	Jalan Raya Purwosari Blok 13, RT.001 RW.003, Kel.Purwosari, Kec, Mijen.	Hak Pakai	20/05/2011	175	Kebun Buah	Pembelian	521.001,23	Kebun dinas
35	Tanah Kebun Induk	5.475,00	2011	Jalan Purwosari Blok.13, RT.001 RW.003, Kel. Purwosari, Kec. Mijen.	Hak Pakai	20/05/2011	176	Kebun Buah	Pembelian	312.063,58	Kebun dinas

Tabel 2. 4
Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2001								
1	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	B	160	UPTD KEBUN DINAS PERTANIAN, Kel.Tambangan, kec. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	380.555,00
2	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	B	30000	Taman Lalu Lintas, Kel. Mangkang Kulon		Tanah Milik Pemda	Pembelian	238.300,00
3	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	B	1.6	UPTD MIJEN, Kel.Tambangan, Kec. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	9.350,00
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	KB	89	BPP Gunungpati, Kel.Gunungpati, kec.Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	672.478,30
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	48	UPTD MIJEN, Kel. Tambangan, Kec. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	361.512,60
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	KB	76.15	BPP Gunungpati, Kec.Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	139.349,61
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	48	UPTD MIJEN, Kel.Tambangan, Kec.Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	223.807,23
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	544	BPP Kramas, Kel. Pedalangan, Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	380.389,43

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	KB	143	Kel.Penggaron Kidul, Kec.Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.720,00
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	50	BBP Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	86.365,00
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	50	BBP. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	8.635,00
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	100	BPP MIJEN, Kel.Tambangan, Kec.Mij en		Tanah Milik Pemda	Pembelian	373.050,00
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	150	BBP. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	261.033,90
14	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	28702	BPP MIJEN, Kel.Tambangan, Kec.Mij en		Tanah Milik Pemda	Pembelian	261.827,00
15	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	4560	Kebun Purwosari, Kel.Purwosari, Kec.Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	316.900,00
16	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	77	BPP MIJEN, Kel.Tambangan, Kec.Mij en		Tanah Milik Pemda	Pembelian	206.486,00
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	50	Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	17.870,00
18	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	50	BBP Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	177.800,00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2009								
1	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	80	BBP Mijen, Kel. Tambangan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	70.029,20
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2010								
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	8	BBP Mijen, Kel. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	59.260,00
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	1000	BBP Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	178.427,00
3	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	100	BBP Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	15.471,00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2011								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	56	BBP Mijen Kel. Tambangan, Kec. Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	91.888,20
2	Bangunan Gedung	B	1440	BBP Mijen dan Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	283.778,16

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
	Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen							
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	1000	BBP Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	268.260,99
4	Pagar Permanen	B	12796	BBP Gunungpati, Kec. gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	296.644,65
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2012								
1	Flat/rumah Lain-lain (dst)	B	524	BPP Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	9.800,00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2014								
1	Bangunan Gedung Kantor Darurat	B	742	Kebun Plalangan, Gunungpati, Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	172.760,00
2	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	B	72	Jl. RM Hadi Subeno, Kel. Tambangan, Kec. Mijen			Hibah	196.500,00
3	Pagar Permanen	B	95	Kebun Plalangan, Kel. Plapangan, Kec. Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	109.135,00
4	Pagar Permanen	B	54	Kebun Mangunsari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	171.745,00
5	Pagar Permanen	B	64.19	Urban Farming Corner, Kel. Mugassari, Kec. Semarang Selatan no		Tanah Milik Pemda	Pembelian	122.600,00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2015								
1	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	B	6	Hutan Kota Krobokan, Jalan Jodipati Barat, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	192.488,40
2	Pagar Permanen	B	165	Hutan Kota Krobokan, Jalan Jodipati Barat, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat		Tanah Milik Pemda	Pembelian	202.947,20
3	Pagar Permanen	B	60	Dinas Pertanian Kota Semarang, kantor kompak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	45.306,80
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2016								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	48	Kebun Dinas BPP Kramas, Pedalangan, Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	364.228,24
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	145	Kebun Dinas Wates, Wates, Ngaliyan, Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	779.445,85
3	Gedung Pos Jaga Permanen	B	12.6	Kel. Tambangan, Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.075,00
4	Gedung Pos Jaga Permanen	B	12.6	Kel. Cepoko, Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.075,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
5	Pagar Lain-lain (dst)	B	100	Embung Purwosari, Kel. Purwosari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	74.765,79
6	Pagar Lain-lain (dst)	B	102	Embung Cepoko, Dukuh Jetis, Cepoko, Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	73.155,21
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2017								
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	127.5	Kebun Dinas Wates		Tanah Milik Pemda	Pembelian	21.050,00
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	5459	Kebun Dinas Purwosari, Agro Purwosari, Kel. Purwosari			Pembelian	134.490,00
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	172.75	Kebun Dinas Wates			Pembelian	17.340,00
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	132	Gedung UPTD IV, BPP MIJEN			Pembelian	199.712,00
5	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	B	150	Jalan Menteri Supeno, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan, sebelah SMA 1			Pembelian	35.838,00
6	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	B	218288	Agro Purwosari, Kebun Purwosari, Mijen			Pembelian	1.742.544,00
7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	B	75	Agro Purwosari, Kebun Purwosari, Mijen			Pembelian	197.274,73
8	Bangunan Untuk Kandang	B	320	Agro Purwosari, Kebun Purwosari, Mijen			Pembelian	107.273,00
9	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	B					Pembelian	92.962,00
10	Pagar Permanen	B	440	Kebun Cepoko, Gunungpati			Pembelian	612.686,00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2018								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	2385	Jl. Kompak No. 2-3, Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	475.860,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	235	Jl. Kompak No. 2-3, Pedurungan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	453.170,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		UPTD IV Taman, BPP Mijen			Pembelian	199.500,00
4	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	B	66	Agro Purwosari			Pembelian	1.125.859,00
5	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	630	Pendopo Agro Cepoko, Cepoko, Gunungpati			Pembelian	200.248,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
6	Gedung Pos Jaga Permanen	B	6	Jl. Kompak No. 2-3 Pedurungan Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	11.920,00
7	Bangunan Untuk Kandang	B	924	KT. LESTARI, Jongkong Raya 1, Kel. Plalangan, Gununpati			Pembelian	153.698,00
8	Bangunan Untuk Kandang	B	1950	KT. Sidodadi, Dukuh Jetis, Cepoko, Gunungpati			Pembelian	153.527,00
9	Bangunan Untuk Kandang	B	5775	KT. Puspahati, Jalan Kalijaten, Gedawang, Banyumanik			Pembelian	103.275,00
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	265	Agro Purwosari, Kel Purwosari Kec Mijen			Pembelian	2.788.912,00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2019								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	2285	Klinik Hewan, Jl. Slamet Riyadi No, 4 B, Gayamsari, Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	976.699,60
2	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	B	7.35	Kebun Dinas Cepoko, Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	99.518,00
3	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	B	66.41	Agro Purwosari, Mijen			Pembelian	173.528,00
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	B	54	jalan slamet riyadi, Dinas Pertanian Kota Semarang			Pembelian	195.513,00
5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	B	1035	BPP Wates, Ngaliyan			Pembelian	335.974,81
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	1300	Agro Purwosari, Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.243.217,00
7	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	B	1896.35	Agro Purwosari, Kebun Purwosari			Pembelian	197.835,00
8	Pagar Permanen	B	187.68	Kebun Plalangan, Gunungpati, Semarang			Pembelian	199.042,00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2020								
1	Pagar Permanen	B	1200	Kebun dinas Purwosari			Pembelian	207.634,00
2	Pagar Lain-lain (dst)	B	9850	Tempat parkir Agro Purwosari			Pembelian	202.975,00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2021								
1	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	B	48	UFC, Jl. Pandanaran II, Kel. Mugasari, RT.09/04, Kec. Semarang Selatan			Hibah	579.560,00
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	B	54	Gudang Alsintan			Pembelian	215.969,50

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
3	Bangunan Untuk Kandang	B		Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen, Semarang			Pembelian	215.079,99
4	Taman Permanen	B	2	Taman Agro Plalangan, Kebun Plalangan, Gunungpati, Semarang			Pembelian	1.880.974,00
5	Pagar Permanen	B	184	Kebun Dinas Nongkosawit, Gunungpati.			Pembelian	227.806,50
6	Pagar Permanen	B	263.73	Kebun Dinas Tambangan, Mijen.			Pembelian	227.787,50
7	Pagar Permanen	B	274	Kebun Dinas Purwosari, Agro Purwosari			Pembelian	227.433,00
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2022								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	2069.6	Jl. Mulawarman Raya No. 1c, Pedalangan, Banyumnaik			Pembelian	8.597.062,55
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	B	30	Pemb Gudang pakan Sumurejo, kelompok tani rejo			Pembelian	160.373,50
3	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	B	405	Agro Purwosari, Kebun Purwosari			Pembelian	65.393,48
4	Gedung Pos Jaga Permanen	B	9	Jl. Mulawarman Raya No. 1c, Pedalangan, Banyumanik			Pembelian	65.575,09
5	Bangunan Untuk Kandang	B		Kandang sapi Polaman, Mijen			Pembelian	220.782,00
6	Taman Permanen	B		Peningkatan Agro Plalangan (Taman Agro Plalangan), Kebun Plalangan, Gunungpati			Pembelian	223.102,70
7	Pagar Permanen	B		Kebun Dinas Tambangan, BPP mijen			Pembelian	208.815,39
8	Pagar Permanen	B		Kebun Purwosari, Agro Purwosari			Pembelian	211.703,85
9	Pagar Permanen	B		Jl. Mulawarman Raya No. 1c, Pedalangan, Banyumanik.			Pembelian	261.988,61
10	Pagar Lain-lain (dst)	B		Penataan lahan di BPP Banyumanik			Pembelian	212.635,91
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2023								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Interior Kantor Mulawarman			Pembelian	234.863,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Bangunan UPTD			Pembelian	231.011,60

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		BPP Gunungpati			Pembelian	278.096,15
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		BPP Banyumanik			Pembelian	285.709,74
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		BPP Ngaliyan			Pembelian	286.892,98
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Gedung BPP Mijen			Pembelian	360.407,38
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Klinik Hewan (BPP Gayamsari)			Pembelian	101.742,46
8	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	B	72	Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c.			Pembelian	167.398,12
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B					Pembelian	197.409,64
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	96	Uotlet Cepoko (Agro Cepoko, Gunungpati).			Pembelian	447.120,80
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	1874	Kantor Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No.1c			Pembelian	1.121.284,90
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	37.2	Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c			Pembelian	195.983,23
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	82	Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c			Pembelian	150.851,05
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	B	16	Kebun Dinas. Jl. Mulawarman Raya No. 1c, Kel. Pedalangan, Banyumanik,			Pembelian	58.870,00
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	B	96	Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c.			Pembelian	407.452,03
16	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	B		Rehab Greenhouse Purwosari			Pembelian	96.990,50
17	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	B	24	Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c.			Pembelian	484.378,57
18	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	B	12	Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c.			Pembelian	181.062,21
19	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	B	89.1	Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c.			Pembelian	537.616,87
20	Bangunan Untuk Kandang	B		Prasarana Kandang Cangkiran (Bangunan Instalasi Biogas)			Pembelian	106.924,60

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
21	Bangunan Tempat Parkir	B	78.4	Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c.			Pembelian	125.256,16
22	Bangunan Tempat Parkir	B	70	Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c.			Pembelian	51.317,61
23	Taman lainnya	B		Kampung sawah (UPTD MIJEN)			Pembelian	2.623.910,07
NO. KODE LOKASI: 12.01.11.30.11.01.01.00.2024								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Gedung UFC		Tanah Milik Negara	Pembelian	209.087,36
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Rehab Klinik Hewan dan BPP Gayamsari			Pembelian	1.158.650,56
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1150	Klinik Hewan			Pembelian	1.506.579,00
4	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	B		Smart Greenhouse Cepoko.			Pembelian	214.973,71
5	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	B		Smart Greenhose Gunungpati			Pembelian	248.901,06
6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	B		Rehab Greenhouse Agro Purwosari			Pembelian	134.647,69
7	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	B	462.39	Pemb Sarana Pend Kantor (Gudang)			Pembelian	618.841,65
8	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	B		SMART GREENHOUSE			Pembelian	320.154,92
9	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	B	745	Klinik Hewan			Pembelian	170.394,00
10	Taman lainnya	B		KAMPUNG SAWAH			Pembelian	2.047.535,97
11	1 Pagar Permanen	B		Pagar Kebun Gunungpati			Pembelian	231.012,53
NO. KODE LOKASI: 12.02.11.30.11.01.01.00.2001								
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	KB	96	Kel.Purwosari, Kec.Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	102.062,00
NO. KODE LOKASI: 12.02.11.30.11.01.01.00.2018								
1	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	B	1.5	Kebun Dinas Cepoko			Pembelian	9.800,00
NO. KODE LOKASI: 12.02.11.30.11.01.01.00.2019								
1	Pagar Permanen	B	27.31	Rumah Organik Kebun			Pembelian	39.860,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Purwosari				
NO. KODE LOKASI: 12.02.11.30.11.01.01.00.2022								
1	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	B		Bumi Perkemahan Jatirejo Gunungpati			Pembelian	16.394,70
2	Taman Permanen	B		Kantor Dinas Pertanian Jl. Mulawarman Raya No. 1c.			Pembelian	19.325,60

Selain yang telah dijelaskan di atas, sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian Kota Semarang juga berupa asset bergerak dan asset tidak bergerak. Aset bergerak berupa kendaraan dinas dan hewan-hewan ternak, sedang aset tidak bergerak berupa gedung dan tanah beserta perlengkapannya serta tanaman yang berada di kantor dinas, klinik hewan dan UPTD Agrobisnis yang tersebar di beberapa kecamatan. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5
Data Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Nama bidang barang	Jumlah barang	Satuan barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	**Tanah**	**20**	bidang	**36,390,824,800**	Luas total: 338.168 m2
2	**Peralatan dan mesin**	**1.496**	unit	**10,156,087,374**	
	Alat-alat besar	*16*	*unit*	*450,533,785*	
	Komputer	*182*	*unit*	*1,154,778,866*	
	Rambu-Rambu	*3*	*unit*	*313,210,000*	
	Alat-alat angkutan	*81*	*unit*	*2,444,522,002*	*Mobil: 13 unit, Motor roda 2: 56 unit, Motor roda 3: 4 unit, Gerobak: 22*
	Alat bengkel dan alat ukur	*11*	*unit*	*101,796,988*	
	Alat pertanian	*138*	*unit*	*1,811,785,159*	
	Alat kantor dan rumah tangga	*805*	*unit*	*2,144,732,100*	
	Alat studio dan alat komunikasi	*66*	*unit*	*525,142,041*	
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	*15*	*unit*	*30,425,000*	
	Alat laboratorium	*173*	*unit*	*1,152,352,223*	
	Alat-alat persenjataan/ keamanan	*6*	*unit*	*26,809,210*	
3	**Gedung dan bangunan**	**69**	**unit**	**21,814,121,980**	
	Bangunan Gedung	*69*	*unit*	21,814,121,980	
4	**Jalan. Irigasi dan bangunan**	**87**	unit	**14,122,921,801**	
5	**Aset tetap lainnya**	**5501**	unit	**1,403,152,575**	
	Buku dan perpustakaan	*8*	*buah*	*260,680,000*	
	Barang bercorak kebudayaan	*1*	*buah*	*2,480,000*	
	Hewan dan ternak serta tanaman	*5490*	*macam*	*802,180,575*	
6	**Konstruksi dalam pengerjaan**		unit	**7,777,000**	
	DED		*unit*	*7,777,000*	
7	**Aset lainnya**	**73**	unit	**98,346.212**	
	Peralatan dan Mesin Rusak	*73*	*unit*	*98,346,212*	
	Jumlah			**83,993,231,742**	

Sumber: Dinas Pertanian (data diolah)

UPTD Agrobisnis mengelola 26 kebun dinas yang tersebar di beberapa kecamatan. UPTD Agrobisnis berkantor di Jl. Mulawarman Raya, No 1C, Pedalangan, Banyumanik. Komoditas yang diusahakan antara lain padi dan hortikultura. Rincian lokasi, luas lahan dan komoditas yang diusahakan pada masing-masing kebun dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6
Lokasi, luas lahan dan komoditas pada UPTD Agrobisnis Kota Semarang

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
1	Kebun Purwosari A	2,08	Durian	76	2025	Masa Produksi
	Kel. Purwosari	Ha	Kelengkeng	80	2025	Masa Produksi
	Kec. Mijen		Jambu kristal	215	2025	Masa Produksi
			Sirsat madu	15	2025	Masa Produksi
			Jambu citra	3	2025	Masa Produksi
			Mangga	3	2025	Masa Produksi
			Jeruk	100	2025	Awal Produksi
2	Kebun Purwosari B	1,49	Durian	19	2025	Masa Produksi
	Kel. Purwosari	Ha	Sukun	17	2025	Masa Produksi
	Kec. Mijen		Jambu kristal	130	2025	Masa Produksi
			Petai	2	2025	Masa Produksi
			Sirsat	6	2025	Masa Produksi
			Jambu citra	94	2025	Masa Produksi
			Jambu jamaika	24	2025	Masa Produksi
			Jeruk	80	2025	Awal Produksi
3	Kebun Purwosari C	0,8	Kelengkeng	99	2025	Masa Produksi
	Kel. Purwosari Kec. Mijen	Ha	Jambu kristal	113	2025	Masa Produksi
4	Kebun Purwosari D	1,06	Durian	3	2025	Masa Produksi
	Kel. Purwosari	Ha	Jeruk buah	110	2025	Awal Produksi
	Kec. Mijen		Jambu kristal	45	2025	Awal Produksi
			Sayur Hidroponik	4.276 nettpot	2025	Masa Produksi
			Tanaman buah dalam greenhouse	384 drip	2025	Masa Produksi
			Anggrek tanah	100	2025	Masa Produksi
5	Wates	5,5	Kelengkeng	441	2025	Masa Produksi
	Kel. Wates Kec. Ngaliyan	Ha	Jambu Kristal	832	2025	Masa Produksi
			Sirkaya	4	2025	Masa Produksi
			Sirsat Madu	78	2025	Masa Produksi
			Jeruk	36	2025	Masa Produksi
			Jambu Air	23	2025	Masa Produksi
			Rambutan	15	2025	Masa Produksi
			Mangga	15	2025	Masa Produksi
6	Kebun Bubakan I	1	Kelengkeng	45	2025	Masa Produksi
	Kel. Bubakan	Ha	Jambu kristal	399	2025	Masa Produksi
	Kec. Mijen		Durian	4	2025	Mulai Produksi
			Sirkaya	7	2025	Masa Produksi
			Sirsak	19	2025	Masa Produksi
7	Kebun Bubakan II	1	Durian	57	2025	Masa Produksi
	Kel. Bubakan	Ha	Mangga	2	2025	Masa Produksi
	Kec. Mijen		Kelengkeng	43	2025	Masa Produksi
			Jambu Kristal	35	2025	Masa Produksi
			Alpukat Miki	282	2025	Masa Produksi
8	Gunungpati	1,2	Durian	25	2025	Masa Produksi
	Kel. Gunungpati	Ha	Kelengkeng	72	2025	Masa Produksi
	Kec. Gunungpati		Jambu kristal	139	2025	Masa Produksi
			Sirsat madu	13	2025	Masa Produksi
			Jambu merah	17	2025	Masa Produksi
			Mamesapote	3	2025	Masa Produksi
			Jambu Air	4	2025	Masa Produksi

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
			Plum	1	2025	Mulai Produksi
			Jeruk Nipis	3	2025	Mulai Produksi
			Nangka	1	2025	Masa Produksi
			Srikaya	4	2025	Masa Produksi
			Belimbing	6	2025	Masa Produksi
			Mangga	21	2025	Masa Produksi
			Jamaika	2	2025	Masa Produksi
			Sawo	1	2025	Masa Produksi
			Alpukat	8	2025	Masa Produksi
			Rambutan	5	2025	Masa Produksi
9	Sicentong, Kelurahan Gunungpati Kec. Gunungpati	5 ha	Jambu air	184	2025	Masa Produksi
			Kelengkeng Diamond	30	2025	Masa Produksi
			Kelengkeng Pingpong	30	2025	Masa Produksi
			Sirsak	20	2025	Masa Produksi
			Durian	12	2025	Masa Produksi
			Alpukat	5	2025	Masa Produksi
			Jambu air	184	2025	Masa Produksi
10	Plalangan Kel. Plalangan Kec. Gunungpati	10 Ha	Durian	140	2025	Masa Produksi
			Jeruk Siam	115	2025	Belum Produksi
			Jeruk Pamelo Merah	130	2025	Belum Produksi
			Jeruk Pamelo	49	2025	Belum Produksi
			Jambu Kristal	125	2025	Belum Produksi
			Cengkeh	4	2025	Mulai Produksi
			Kakao	116	2025	Belum Produksi
			Kelengkeng	73	2025	Masa Produksi
			Alpukat	12	2025	Masa Produksi
			Pisang	65	2025	Masa Produksi
			Rambutan	8	2025	Masa Produksi
11	Cepoko A Kel. Cepoko Kec. Gunungpati	2,7 Ha	Kelengkeng	215	2025	Masa Produksi
			Jambu kristal	354	2025	Masa Produksi
			Sirsat madu	62	2025	Masa Produksi
			Durian	49	2025	Masa Produksi
			Jambu air	19	2025	Masa Produksi
			Mangga	25	2025	Masa Produksi
			Nangka	9	2025	Masa Produksi
			Rambutan	7	2025	Masa Produksi
			Srikaya	4	2025	Masa Produksi
			Belimbing	1	2025	Masa Produksi
			Jambu Merah	20	2025	Masa Produksi
			Jambu Citra	1	2025	Masa Produksi
			Jambu	1	2025	Masa Produksi
			Alpukat	33	2025	Masa Produksi
			Delima	2	2025	Masa Produksi
			Jeruk	6	2025	Masa Produksi
			Jeruk Pamelo	2	2025	Masa Produksi
			Plum	2	2025	Masa Produksi
			Jeruk Purut	9	2025	Masa Produksi
			Jeruk Lemon	12	2025	Masa Produksi
12	Cepoko B Kel. Cepoko Kec. Gunungpati	0,5 ha	Mangga	33	2025	Masa Produksi
			Jambu Air	24	2025	Masa Produksi
			Jambu Merah	21	2025	Masa Produksi
			Jambu Kristal	6	2025	Masa Produksi
			Sirsak	6	2025	Masa Produksi
			Kelengkeng	54	2025	Masa Produksi
			Jeruk Lemon	9	2025	Masa Produksi
			Anggur	8	2025	Masa Produksi
			Alpukat	2	2025	Masa Produksi
13	Nongkosawit	1,5	Kelengkeng	100	2025	Masa Produksi

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
	Kel. Nongkosawit	Ha	Jambu kristal	9	2025	Masa Produksi
	Kec. Gunungpati		Sirsak	19	2025	Masa Produksi
			Jambu Merah	50	2025	Masa Produksi
			Durian	1	2025	Masa Produksi
14	Mangunsari Kelurahan Mangunsari	0,8 ha	Rambutan	10	2025	Masa Produksi
15	Kramas	2	Kelengkeng	94	2025	Masa Produksi
	Kel. Pedalangan	Ha	Jambu kristalin	155	2025	Masa Produksi
	Kec. Banyumanik		Sirkaya	2	2025	Masa Produksi
			Durian	1	2025	Masa Produksi
			Rambutan	5	2025	Masa Produksi
			Sirsat Madu	9	2025	Masa Produksi
			Alpukat	6	2025	Masa Produksi
16	Tambangan	2 Ha	Anggrek dendrobium pot (2011)	1000	2025	Masa Produksi
	Kel. Tambangan		Anggrek remaja pot	100	2025	Masa Produksi
	Kec. Mijen		Anggrek dendrobium pot (2012)	400	2025	Masa Produksi
			Anggrek bulan	3	2025	Masa Produksi
			Anggrek dendrobium Penangkaran	5	2025	Masa Produksi
			Indukan Anggrek Dendrobium	5	2025	Masa Produksi
			Indukan Anggrek Phaleonopsis	15	2025	Masa Produksi
			Indukan Anggrek Vanda	3	2025	Masa Produksi
			Indukan Anggrek Cattleya	4	2025	Masa Produksi
			Indukan Anggren Gramatophylum	1	2025	Masa Produksi
			Anggrek Dendrobium Pot (2022)	100	2025	Masa Produksi
			Indukan Anggrek Dendrobium (2022)	3	2025	Masa Produksi
			Indukan Anggrek Vanda (2022)	2	2025	Masa Produksi
			Indukan Anggrek Cattleya (2022)	2	2025	Masa Produksi
			Indukan Anggrek Bulan persilangan antara lokal Taiwan (2022)	3	2025	Masa Produksi
			Sawah	1,05 ha	2025	Masa Produksi
			Jambu air citra	19	2025	Masa Produksi
			Sukun	1	2025	Masa Produksi
			Rambutan	2	2025	Masa Produksi
			Mangga	3	2025	Masa Produksi
			Kelengkeng	2	2025	Masa Produksi
17	UFC (Urban Farming Corner)	500 m2	Tabulampot Jambu Kristal	5	2025	Masa Produksi
	Kel. Mugassari		Tabulampot Belimbing Madu	3	2025	Masa Produksi
	Kec. Semarang Selatan		Tabulampot Cherry Barbados	1	2025	Masa Produksi
			Tabulampot Jeruk Nipis	5	2025	Masa Produksi
			Tabulampot Kelengkeng Aroma Durian	1	2025	Masa Produksi
			Sayur Hidroponik	5 kit	2025	Masa Produksi
			Tabulampot jambu delima	7	2025	Masa Produksi
			Tabulampot alpukat kendil	2	2025	Masa Produksi
			Tabulampot kedondong	4	2025	Masa Produksi
			Tabulampot alpukat midi	1	2025	Masa Produksi
			Tabulampot jeruk	2	2025	Masa Produksi

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
			Tabulampot rambutan	2	2025	Masa Produksi
			Tabulampot jeruk limau	1	2025	Masa Produksi
			Tabulampot anggur	2	2025	Masa Produksi
			Tabulampot kelengkeng merah	2	2025	Masa Produksi
18	Sawah Cangkiran Kel Cangkiran Mijen	0,7 ha	Padi	0,7 ha	2025	Masih Produksi

Sumber: Dinas Pertanian (data diolah)

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di UPTD Agrobisnis maka diperlukan sarana parsarana. Sarana prasarana yang ada di UPTD Agrobisnis antara lain:

a. Kendaraan operasional:
   1. Kendaraan bermotor roda 4 : 2 unit pick up
   2. Kendaraan bermotor roda 3 : 2 unit
   3. Kendaraan bermotor roda 2 : 7 unit

b. Alat dan mesin pertanian
   1. Generator : 2 unit
   2. Mesin pemotong rumput : 14 unit
   3. Cultivator : 1 unit
   4. Sprayer : 20 unit
   5. Laminar Flow : 3 unit
   6. Mist blower : 3 unit
   7. Pres plastic : 1 unit
   8. Shaker : 4 unit
   9. Pompa air : 5 unit
   10. Autoklaf : 3 unit

Lokasi Kantor Dinas Pertanian Kota Semarang yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pertanian Kota Semarang. Lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Semarang di Gedung Mr. Moch. Ikhsan Jl. Pemuda memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, *scanner* dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Pertanian Kota Semarang.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pilihan pertanian yang disajikan pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Produktivitas pertanian	ha/tahun			NA	6,38	6,38	6,38	6,38	NA	6,76	6,96	6,85	6,82	NA	105,96	109,09	107,37	106,90
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%			NA	-5	-5	-5	-5	-151,85	-42	7.108	-88,21	-53,92	NA	833,4	-142.166,60	1.764,20	1.078,40
3	Sentra produk unggulan pertanian	Kawasan			3	4	4	5	6	3	4	4	5	6	100	100	100	100	100
4	Jumlah kawasan pertanian perkotaan	Kelurahan			69	85	117	132	147	91	104	177	177	177	131,88	122,35	151,28	134,09	120,41
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%			NA	75	75	75	80	NA	100	93	100	100	NA	133,33	124,00	133,33	125,00
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%			NA	75	75	81	81	NA	94	44	38	63	NA	125,33	58,67	46,91	77,78

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pertanian Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pertanian Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang.

Tabel 2. 8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026

Uraian	Anggaran						Realisasi Anggaran						Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke- (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke- (Rp 000.000)						pada Tahun ke- (Rp 000.000)													
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	7.045,12	5.967,18	8.497,34	11.614,68	9.644,16	-	5.844,46	5.081,80	7.940,93	10.350,53	536,25	-	82,96	85,16	93,45	89,12	5,56	63,79	73,56
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	5.338,16	2.129,46	8.205,31	4.165,15	3.881,58	-	4.796,97	2.058,44	7.519,46	3.442,11	141,25	-	89,86	96,66	91,64	82,64	3,64	175,98	153,99
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	568,43	1.709,23	802,75	467,88	743,91	-	523,82	1.572,31	682,62	454,56	540,07	-	92,15	91,99	85,04	97,15	72,60	105,94	110,17

Uraian	Anggaran						Realisasi Anggaran						Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke- (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke- (Rp 000.000)						pada Tahun ke- (Rp 000.000)													
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	216,45	236,35	174,07	152,28	-	-	201,76	222,97	166,39	35,75	-	0,00	93,21	94,34	95,59	23,48	-17,16	-14,86
Program Penyuluhan Pertanian	-	903,98	1.286,45	5.125,51	1.373,03	840,05	-	757,97	1.184,46	4.314,54	1.250,09	252,75	-	83,85	92,07	84,18	91,05	30,09	267,52	249,50
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	15.940,64	18.217,70	18.873,77	21.774,24		-	15.281,85	17.230,53	18.336,20	20.158,73		-	95,87	94,58	97,15	92,58		33,25	29,11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.031,04	-	-	-	-		1.271,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-0,46	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	616,73	-	-	-	-		609,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-0,77	0,00

Uraian	Anggaran						Realisasi Anggaran						Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke- (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke- (Rp 000.000)						pada Tahun ke- (Rp 000.000)													
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46,02	-	-	-	-		46,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-0,74	0,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	329,81	-	-	-	-		329,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,25	0,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	1.967,69	-	-	-	-		1.964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-0,60	0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	153,51	-	-	-	-		153,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-0,31	0,00

Uraian	Anggaran						Realisasi Anggaran						Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke- (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke- (Rp 000.000)						pada Tahun ke- (Rp 000.000)													
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	V (2025 TW II)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.465,50	-	-	-	-		2.465,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,57	0,00
Program Pengembangan SDM Pertanian	359,35	-	-	-	-		359,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-0,56	0,00
Program Peningkatan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani Peternak	55,68	-	-	-	-		55,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-0,05	0,02
Program Pengembangan Pertanian Perkotaan	1.505,73	-	-	-	-		1.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-0,66	0,00

Dari sisi pendapatan, Dinas Pertanian Kota Semarang mendapatkan pendapatan dari penjualan hasil-hasil pertanian dan peternakan. Tabel 2.8 di bawah ini memperlihatkan kinerja pedapatan Dinas Pertanian Kota Semarang selam kurun waktu 2021-2026. Kinerja pendapatan rata-rata Dinas Pertanian Kota Semarang masih relatif cukup tinggi yaitu 83,18% per tahun. Pencapaian kinerja pendapatan tersebut dipengaruhi oleh penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit/benih tanaman dan ternak, pelayanan kesehatan hewan, dan pelayanan kebun dinas.

Tabel 2. 9
Realisasi Pendapatan Dinas Pertanian Kota Semarang 2021-2026

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	I 2020	1.061.825.000	1.091.096.440	29.271.440
2	II 2021	2.400.000.000	2.357.699.140	-42.300.860
3	III 2022	729.842.400	890.530.130	160.687.730
4	IV 2023	323.977.000	226.858.000	-97.119.000
5	V 2024	492.498.678	365.546.600	-126.952.078

Sumber: Dinas Pertanian (data diolah)

c. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pertanian tidak dapat berjalan sendiri melainkan memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Kehadiran para mitra, baik dari unsur pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, maupun kelompok masyarakat, menjadi bagian penting dalam memperkuat peran Dinas Pertanian dalam mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat pencapaian tujuan strategis, tetapi juga memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan dapat menjawab kebutuhan dan tantangan nyata di lapangan. Mitra Dinas Pertanian dalam memberikan pelayanan antara lain :

1) Dinas Pertanian dan Perkebunan Proovinsi Jawa Tengah.

Kemitraan antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pertanian Kota Semarang terjalin dalam rangka memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan pertanian di daerah. Bentuk kerja sama ini mencakup sinkronisasi kebijakan, pendampingan teknis, penyediaan sarana dan prasarana, hingga fasilitasi akses permodalan dan pemasaran hasil pertanian. Dengan adanya kemitraan ini, program-program pembangunan pertanian di Kota Semarang dapat lebih terarah, selaras dengan kebijakan provinsi, serta mampu menjawab kebutuhan petani secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2) Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Kemitraan antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang dengan Dinas Pertanian Kota Semarang terwujud melalui kerja sama dalam penyediaan dan pengolahan data statistik sektor pertanian. BPS berperan dalam melaksanakan kegiatan pendataan, termasuk pendataan hasil panen, produktivitas, serta luas lahan, yang kemudian menjadi dasar bagi analisis dan perumusan kebijakan. Sementara itu, Dinas Pertanian Kota Semarang berperan dalam memberikan data lapangan, melakukan verifikasi, serta memanfaatkan hasil pendataan tersebut untuk penyusunan program kerja dan evaluasi kinerja pembangunan pertanian. Kolaborasi ini memastikan tersedianya data

yang akurat, valid, dan mutakhir sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan daya saing sektor pertanian di Kota Semarang.

3) Dinas Peternakan Provinsi

Kemitraan antara Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah terwujud dalam rangka mendukung pengembangan subsektor peternakan, khususnya terkait aspek mutu dan keamanan pangan asal hewan. Dalam mekanisme ini, Dinas Pertanian Kota Semarang berperan memberikan rekomendasi teknis bagi pelaku usaha yang mengajukan penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), berdasarkan hasil verifikasi di lapangan. Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk menerbitkan NKV sebagai bentuk legalitas dan jaminan keamanan produk hewan. Melalui sinergi tersebut, proses pengawasan, pembinaan, hingga penerbitan NKV dapat berjalan lebih efektif, sehingga produk pangan asal hewan di Kota Semarang terjamin mutu, keamanan, serta kelayakannya untuk dikonsumsi masyarakat.

4) Balai Besar Pelatihan Pertanian

Kemitraan antara Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Kerja sama ini diwujudkan melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pendampingan teknis yang ditujukan tidak hanya bagi aparatur pemerintah, tetapi juga bagi penyuluh, petani, serta pelaku usaha pertanian. Melalui BBPP, Dinas Pertanian Kota Semarang mendapatkan dukungan dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang inovatif, serta penyediaan tenaga ahli dan fasilitator berpengalaman.

Selain itu, kemitraan ini juga mencakup fasilitasi akses informasi dan teknologi pertanian terbaru yang dapat diaplikasikan di lapangan, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan, digitalisasi pertanian, dan penguatan kelembagaan petani. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan sumber daya manusia pertanian di Kota Semarang semakin profesional, adaptif terhadap perubahan, serta mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Pada akhirnya, kemitraan dengan BBPP berperan penting dalam mendukung terwujudnya sektor pertanian Kota Semarang yang tangguh, berdaya saing tinggi, serta berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

5) Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu

Kemitraan antara Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu diwujudkan melalui program penyediaan bibit ternak unggul, seperti ayam dan kelinci, yang selanjutnya dikembangkan oleh Dinas Pertanian dan didistribusikan kepada kelompok tani atau kelompok ternak untuk diperbanyak lagi. Pola kerja sama ini tidak hanya bertujuan memperkuat ketersediaan bibit berkualitas, tetapi juga mendorong pengembangan usaha peternakan rakyat agar lebih produktif, berkelanjutan, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Melalui pendampingan teknis dan monitoring, kelompok tani dibina untuk mampu mengelola bibit yang diberikan sehingga dapat berkembang menjadi populasi yang lebih besar dan berdaya saing.

Selain kerja sama dalam hal penyediaan bibit ternak, kemitraan ini juga meliputi kegiatan peningkatan kapasitas peternak melalui pelatihan budidaya, pengelolaan pakan, serta penerapan standar kesehatan dan sanitasi ternak. Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu bersama Dinas Pertanian Kota Semarang turut berperan dalam mendukung diversifikasi usaha peternakan, sehingga kelompok tani memiliki peluang usaha tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dengan sinergi ini, subsektor peternakan di Kota Semarang diharapkan dapat tumbuh lebih cepat, memberikan kontribusi pada ketahanan pangan, serta mendukung pembangunan pertanian yang berdaya saing dan inklusif.

6) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah (Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang)

Kemitraan antara Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Balai Karantina Hewan terjalin dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas ternak dan produk hewan sekaligus menjamin aspek kesehatan dan keamanannya. Dalam mekanisme ini, Dinas Pertanian Kota Semarang berperan memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap kondisi hewan atau produk hewan yang akan didistribusikan. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi Balai Karantina Hewan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai dokumen resmi yang menyatakan bahwa hewan atau produk hewan tersebut sehat, layak, dan aman untuk diperdagangkan maupun dipindahkan antarwilayah. Melalui sinergi ini, pengawasan kesehatan hewan dapat lebih optimal, risiko penyebaran penyakit hewan dapat diminimalisir, serta mutu produk hewan yang beredar di masyarakat Kota Semarang lebih terjamin.

7) Fakultas Pertanian dan Peternakan UNDIP

Kemitraan antara Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam memadukan peran pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup penelitian terapan untuk menjawab berbagai tantangan sektor pertanian dan peternakan, pengembangan inovasi teknologi tepat guna, serta pelaksanaan program magang dan praktik lapangan bagi mahasiswa. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat menjadi bagian penting dari kemitraan ini, di mana dosen dan mahasiswa UNDIP bersama Dinas Pertanian memberikan pendampingan langsung kepada petani dan peternak dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, maupun demonstrasi teknologi baru.

Melalui kegiatan tersebut, petani dan peternak memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka, sementara pihak akademisi mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan hasil penelitian sekaligus menyerap masukan dari masyarakat. Sinergi antara Dinas Pertanian Kota Semarang dan UNDIP ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian, mempercepat adopsi teknologi inovatif, serta mendorong terwujudnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

8) Fakultas Pertanian UNIKA

Kemitraan antara Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Fakultas Pertanian Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya pengembangan sektor pertanian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk kerja sama ini meliputi penelitian terapan yang relevan dengan kebutuhan daerah, program magang serta praktik lapangan bagi mahasiswa, hingga kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam pendampingan kepada petani dan kelompok tani. Dalam konteks pengabdian masyarakat, sinergi ini diwujudkan melalui penyuluhan, pelatihan, dan penerapan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan keterampilan serta kapasitas petani.

Dinas Pertanian Kota Semarang mendapatkan manfaat berupa dukungan akademis, rekomendasi kebijakan, serta inovasi teknologi yang dapat memperkuat program kerja, sementara Fakultas Pertanian UNIKA memperoleh wadah untuk penerapan ilmu, penelitian lapangan, sekaligus pembelajaran bagi mahasiswa. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mendorong adopsi teknologi tepat guna, serta mendukung pembangunan pertanian Kota Semarang yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam upaya memperkuat pencapaian kinerja pembangunan pertanian, dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu faktor penting yang mampu mendorong efektivitas pelaksanaan program. Peran BUMD tidak hanya sebatas sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, prasarana, pembiayaan, serta memperluas akses pasar bagi hasil pertanian. Dalam konteks ini, PT Bhumi Pandanaran Sejahtera melalui unit Rumah Potong Hewan (RPH) dan Budidaya Hewan Potong (BHP) memberikan dukungan nyata melalui penyediaan layanan pemotongan hewan yang memenuhi standar higienis serta penyediaan hewan potong yang berkualitas. Lebih jauh, peran RPH juga menjadi sangat strategis karena jumlah produksi daging potong yang dihasilkan dan tercatat di RPH berkontribusi langsung pada indikator kinerja Dinas Pertanian, khususnya dalam pencapaian target produksi daging potong di Kota Semarang. Dengan demikian, keberadaan unit RPH dan BHP tidak hanya menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), tetapi juga mendukung pencapaian kinerja dinas secara terukur, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan daya saing sektor peternakan dan pertanian secara berkelanjutan.

e. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan, kerjasama daerah menjadi salah satu instrumen penting yang harus dijalankan oleh perangkat daerah. Melalui kerjasama ini, Dinas Pertanian Kota Semarang dapat bersinergi dengan pemerintah daerah lain, baik dalam lingkup provinsi maupun antar kota/kabupaten, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memperluas jaringan pasar, serta memperkuat program-program strategis yang saling mendukung. Kerjasama daerah juga menjadi wujud komitmen bersama dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan sektor pertanian lintas wilayah, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kerjasama yang dilaksanakan Dinas Pertanian dalam memberikan pelayanan antara lain :

1) BRIN

Dinas Pertanian Kota Semarang menjalin kemitraan strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka pengembangan inovasi teknologi pertanian yang adaptif terhadap kondisi lahan dan perubahan iklim. Salah satu bentuk nyata kerja sama tersebut adalah uji coba dan pengembangan varietas padi Biosalin yang memiliki keunggulan tahan terhadap kadar salinitas tinggi. Program ini dilaksanakan di lahan pesisir Mangunharjo, Kecamatan Tugu, yang sebelumnya tidak produktif akibat intrusi air laut dan rob. Melalui kolaborasi ini, BRIN berperan dalam penyediaan riset, pendampingan teknis, pemilihan varietas, penerapan smart farming, serta verifikasi kualitas benih, sementara Dinas Pertanian Kota Semarang memfasilitasi lahan, mendukung logistik pelaksanaan, serta mengoordinasikan kerja sama dengan kelompok tani setempat.

Hasil yang telah dicapai dari kerja sama tersebut ditandai dengan panen perdana varietas Biosalin 1 dan Biosalin 2 yang menghasilkan sekitar 116,95 ton Gabah Kering Panen (GKP) dari luas lahan 20 hektar, dengan produktivitas rata-rata 5,85 ton per hektar. Capaian ini menunjukkan potensi pengembangan yang lebih luas pada lahan pesisir Kota Semarang, dengan proyeksi hingga ± 400 hektar yang dapat dioptimalkan. Melalui kemitraan ini, Dinas Pertanian Kota Semarang bersama BRIN berkomitmen untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas lahan suboptimal, serta memperkuat kemandirian dan daya saing sektor pertanian di daerah.

Dinas Pertanian Kota Semarang menjalin kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka penerapan inovasi teknologi budidaya bawang merah melalui metode True Shallot Seed (TSS). Metode ini menggunakan biji sebagai bahan tanam pengganti umbi, sehingga mampu menekan biaya produksi secara signifikan sekaligus menghasilkan kualitas panen yang lebih baik. Uji coba penerapan metode TSS pada varietas *Lokananta* dan *Maserati* menunjukkan efisiensi biaya bibit yang jauh lebih rendah dibandingkan metode konvensional, serta menghasilkan produktivitas yang kompetitif dengan rata-rata mencapai ±20 ton per hektar.

Dalam pelaksanaannya, BRIN memberikan dukungan berupa penyediaan benih, pendampingan teknis, serta penerapan teknologi budidaya modern, sedangkan Dinas Pertanian Kota Semarang berperan dalam penyediaan lahan demplot, fasilitasi kegiatan penyuluhan, serta pembinaan kelompok tani dalam adopsi teknologi. Kerjasama ini menjadi salah satu wujud inovasi pengembangan hortikultura di Kota Semarang yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, memperluas akses bibit unggul, serta memperkuat daya saing bawang merah lokal. Dengan demikian, penerapan metode TSS diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja Dinas Pertanian, khususnya dalam peningkatan produksi hortikultura, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani.

2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Dinas Pertanian Kota Semarang menjalin kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang (Lapas Ngaliyan) dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat binaan. Melalui kemitraan ini dilaksanakan pelatihan

tanaman pangan, khususnya budidaya jagung manis, yang difokuskan untuk warga binaan yang mendekati masa bebas bersyarat, agar mereka memperoleh keterampilan praktis dari mulai penyemaian, perawatan, sampai proses panen. Pelatihan tersebut dilakukan dengan melibatkan penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai instruktur teknis.

Pelaksanaan budidaya tanaman pangan di lingkungan Lapas juga mencakup pemanfaatan lahan yang tersedia serta aplikasi teknik pengelolaan tanaman yang efisien dan berkelanjutan, termasuk penanganan hama secara terpadu. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman pangan dalam skala lokal, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan yang memberikan peluang peningkatan keterampilan serta kemandirian ekonomi bagi warga binaan setelah masa pidana berakhir. Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dalam hal penyebaran inovasi pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan, serta penguatan kontribusi sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

3) Kelompok Tani

Sejalan dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerjasama Pengelolaan Kebun Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang melaksanakan kerjasama strategis dengan kelompok tani dalam pengelolaan Kebun Dinas. Dalam pelaksanaannya, kelompok tani diberi akses untuk mengelola lahan kebun dinas melalui kontrak kerjasama yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk penyediaan sarana produksi, pembinaan teknis, pemeliharaan, perawatan tanaman, serta pembagian hasil.

Melalui kemitraan tersebut, Dinas Pertanian bertanggung jawab menyusun pedoman teknis, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta memberikan fasilitasi berupa bibit, pupuk, dan penyuluhan. Sementara kelompok tani menjalankan operasional harian pengelolaan tanaman secara profesional berdasarkan standar yang ditetapkan, termasuk penerapan praktik budidaya yang baik dan pemeliharaan kualitas produksi. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas lahan kebun dinas, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok tani, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota, serta memperkuat kontribusi kelompok tani terhadap ketahanan pangan dan target kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

4) TNI

Dinas Pertanian Kota Semarang menjalin kerja sama dengan Kodim 0733 Kota Semarang dan Kodam IV/Diponegoro dalam rangka memperkuat ketahanan pangan melalui kegiatan nyata di lapangan. Salah satu bentuk konkret kerja sama tersebut adalah pelaksanaan program Serapan Gabah Petani (“Sergap”) di wilayah Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, dimana Kodim bersama Dinas Pertanian memfasilitasi pembelian gabah dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani dan memastikan serapan hasil panen untuk mendukung stok pangan lokal.

Selain itu, TNI melalui Kodam IV/Diponegoro dan jajaran Kodim ikut serta dalam aksi penanaman jagung serentak serta optimalisasi lahan tidur, misalnya pembukaan lahan di Tembalang yang ditanam

jagung dan pisang, sebagai upaya diversifikasi pangan dan pemanfaatan lahan yang belum produktif. Kegiatan kolaboratif ini mencakup penyediaan lahan, pendampingan teknis budidaya, serta penggalangan partisipasi kelompok tani, sehingga program tidak hanya bersifat simbolis tetapi mampu memberikan dampak peningkatan produksi, pendapatan petani, dan stok pangan yang lebih stabil di Kota Semarang.

Melalui sinergi dengan TNI, Dinas Pertanian Kota Semarang memperkuat mekanisme pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, memperluas cakupan intervensi di lapangan, dan memperkuat kehadiran pemerintah di wilayah-wilayah strategis. Ke depan, kerja sama ini diharapkan terus dikembangkan dalam aspek pembukaan lahan produktif, diversifikasi tanaman pangan, serta peningkatan kapasitas petani agar target-target kinerja Dinas Pertanian terkait produktivitas tanaman pangan dan ketahanan pangan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

f. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menjawab dinamika pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, perangkat daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Inovasi daerah menjadi instrumen penting untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, Dinas Pertanian Kota Semarang senantiasa mengembangkan berbagai inovasi di bidang pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan, baik melalui pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan, maupun optimalisasi jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Inovasi-inovasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran strategis, meningkatkan kinerja pembangunan sektor pertanian, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa inovasi program yang telah dijalankan antara lain :

1) Urban Farming Corner (UFC)

Salah satu inovasi unggulan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah pengembangan Urban Farming Corner (UFC), yaitu ruang edukasi dan praktik pertanian perkotaan yang dirancang sebagai sarana pembelajaran, pelatihan, dan promosi pertanian modern bagi masyarakat. Urban Farming Corner hadir untuk menjawab tantangan terbatasnya lahan pertanian di wilayah perkotaan sekaligus mengoptimalkan potensi lahan sempit dengan teknologi budidaya yang ramah lingkungan, efisien, dan bernilai ekonomis.

Melalui inovasi ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan berbagai teknik pertanian perkotaan seperti hidroponik, vertikultur, aquaponik, serta pengolahan hasil pertanian skala rumah tangga. Selain sebagai sarana edukasi, Urban Farming Corner juga berfungsi sebagai pusat percontohan, media promosi produk lokal, serta wahana pemberdayaan komunitas pertanian kota, termasuk kelompok wanita tani, pemuda tani, dan pelaku usaha mikro.

Keberadaan Urban Farming Corner tidak hanya mendukung program ketahanan pangan rumah tangga, tetapi juga mendorong terbentuknya gaya hidup hijau (green lifestyle), peningkatan kemandirian pangan masyarakat, dan terbukanya peluang usaha di sektor pertanian perkotaan. Dengan demikian, UFC menjadi inovasi strategis yang

selaras dengan visi Dinas Pertanian Kota Semarang dalam mewujudkan pertanian perkotaan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

2) Urban Farming Champion

Urban Farming Champion merupakan salah satu inovasi strategis Dinas Pertanian Kota Semarang yang diselenggarakan secara berkelanjutan sejak beberapa tahun terakhir. Program ini dirancang sebagai ajang kompetisi sekaligus wahana edukasi bagi masyarakat, sekolah, kelurahan, kelompok wanita tani, maupun komunitas lokal dalam mengembangkan pertanian perkotaan. Melalui tahapan seleksi, presentasi, hingga observasi lapangan, kegiatan ini menekankan pada kreativitas, inovasi, serta kemampuan peserta dalam mengelola lahan terbatas untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman obat keluarga (TOGA).

Selain sebagai wadah apresiasi dan penghargaan, Urban Farming Champion berfungsi sebagai pemantik agar masyarakat terdorong untuk lebih giat mempraktikkan kegiatan bertani di lingkungan masing-masing, baik di pekarangan rumah, sekolah, maupun lahan bersama. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta budaya bertani yang berkelanjutan di perkotaan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian pangan, pemanfaatan ruang terbatas secara produktif, serta gaya hidup ramah lingkungan.

Lebih jauh, inovasi Urban Farming Champion juga menjadi instrumen untuk memperkuat partisipasi publik dalam mendukung ketahanan pangan daerah, membangun jejaring komunitas pertanian perkotaan, dan menumbuhkan generasi muda yang memiliki minat serta keterampilan di bidang pertanian. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan skala lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang dalam bidang inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sektor pertanian yang inklusif serta berkelanjutan.

3) Pertanian Terpadu

Pertanian Terpadu merupakan salah satu inovasi Dinas Pertanian Kota Semarang yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi antara budidaya tanaman hortikultura dan pemeliharaan ternak. Program ini memberikan dukungan berupa paket bantuan sarana produksi yang mencakup benih sayuran strategis seperti cabai, tomat, terong, dan bawang merah, disertai dengan bibit ternak ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) yang memiliki produktivitas telur dan daging lebih baik dibanding ayam lokal biasa.

Pelaksanaan pertanian terpadu diarahkan kepada kelompok tani, kelompok wanita tani, maupun masyarakat di wilayah perkotaan agar mampu memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal dengan pola budidaya berkelanjutan. Integrasi tanaman hortikultura dengan pemeliharaan ayam KUB tidak hanya menghasilkan sumber pangan gizi seimbang bagi keluarga, tetapi juga membuka peluang usaha skala kecil yang dapat menambah pendapatan rumah tangga. Selain itu, keberadaan pupuk organik dari limbah ternak turut menunjang produktivitas tanaman sehingga tercipta siklus pertanian yang ramah lingkungan.

Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan sampai saat ini sudah tersebar di 48 kelurahan di Kota Semarang. Ke depan, kegiatan pertanian terpadu akan terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya dalam periode Renstra 2025–2029, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat perkotaan. Inovasi pertanian terpadu berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, pemantik partisipasi aktif warga dalam praktik pertanian, sekaligus instrumen percepatan pencapaian target kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang dalam bidang ketahanan pangan, diversifikasi produksi pertanian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Manajemen Pangan

Manajemen Pangan di Kawasan BPP Mijen merupakan inovasi strategis yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Mijen sebagai fasilitas demonstrasi (demplot) sekaligus edukasi publik. Kawasan ini digunakan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura dalam satu kawasan terpadu, termasuk komoditas seperti sayuran, tanaman pangan lainnya, dan varietas padi unggulan dalam display varietas. Kegiatan Tanam Kawasan Manajemen Pangan bahkan secara rutin melibatkan masyarakat, kelompok tani, serta pemangku kebijakan daerah dalam kegiatan tanam bersama di lahan seluas ± 1 hektar di BPP Mijen.

Melalui zona manajemen pangan ini, Dinas Pertanian memanfaatkan lahan demplot sebagai sarana penerapan praktik budidaya yang baik (good agricultural practices), demonstrasi teknik budidaya modern, dan pengenalan varietas tanaman yang memiliki potensi tinggi. Program ini berfungsi sebagai media pembelajaran bagi petani, penyuluh, dan masyarakat umum agar lebih memahami proses produksi tanaman pangan berkualitas, mulai dari persiapan lahan hingga panen, termasuk pengendalian organisme pengganggu tanaman secara ramah lingkungan. Lebih dari sekadar lahan praktikum, Manajemen Pangan Kawasan BPP Mijen juga menjadi pemicu partisipasi aktif masyarakat dalam praktik bertani: program tanam bareng, pelibatan masyarakat luas, dan kegiatan edukatif lainnya diharapkan memotivasi warga yang sebelumnya belum bertani untuk mulai menanam di pekarangan atau lahan kecil di lingkungan mereka.

Ke depan, pada periode Renstra 2025–2029, pengembangan Manajemen Pangan Kawasan BPP Mijen akan diperluas dengan integrasi budidaya ternak, khususnya sapi perah, menggunakan metode pakan sistem fodder (pakan hijauan hidroponik) yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan. Selain itu, limbah ternak akan dikelola melalui pemanfaatan biogas sehingga mendukung penyediaan energi terbarukan sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dengan pengembangan tersebut, kawasan BPP Mijen akan menjadi model pertanian terpadu berbasis tanaman dan ternak yang tidak hanya meningkatkan produktivitas pangan, tetapi juga mencerminkan prinsip keberlanjutan dan efisiensi sumber daya.

5) Jambore Petani Cilik dan Remaja Tani

Jambore Petani Cilik dan Remaja Tani merupakan inovasi strategis yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai bagian dari upaya pengenalan pertanian sejak usia dini sekaligus regenerasi petani. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak 2024, dengan melibatkan perwakilan sekolah dasar dan

sekolah menengah pertama di Kota Semarang. Format kegiatan dikemas dalam bentuk perkemahan selama dua hari, yang memberikan pengalaman kebersamaan, kemandirian, serta pembelajaran kontekstual di alam terbuka. Berbagai rangkaian kegiatan edukatif dan rekreatif dilaksanakan, antara lain pemilihan Duta Petani Cilik dan Remaja Tani, gelar pameran urban farming, lomba cerdas tangkas pertanian, gelar teknologi tepat guna, pelatihan tabulampot, serta gerakan konsumsi sayur, buah, dan susu, sehingga menjadi sarana pembelajaran interaktif yang menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian.

Inovasi ini berfungsi sebagai wahana edukasi dan pemantik semangat bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan mempraktikkan kegiatan bertani di lingkungan masing-masing. Melalui perpaduan kegiatan praktik pertanian, kreativitas, dan kebersamaan dalam perkemahan, peserta memperoleh pengetahuan teknis sekaligus pengalaman sosial yang memperkuat karakter serta kepedulian mereka terhadap sektor pertanian.

Ke depan, Jambore Petani Cilik dan Remaja Tani akan terus dikembangkan tidak hanya pada lingkup pelajar sekolah dasar dan menengah, tetapi juga diarahkan untuk menjaring peserta dari kalangan generasi muda yang lebih luas, termasuk mahasiswa atau kelompok zilenial. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan berbagai gagasan serta inovasi baru di bidang pertanian yang relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat kesinambungan regenerasi petani di Kota Semarang.

6) Petruk Semar

Petruk Semar adalah inovasi operasional yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pertanian, bertujuan untuk memfasilitasi pemasaran langsung hasil pertanian dari petani dan kebun dinas kepada konsumen. Truk operasional ini dirancang untuk memutus mata rantai distribusi yang panjang, sehingga kelompok tani dapat memperoleh nilai jual yang lebih baik dan masyarakat dapat memperoleh produk pertanian lokal yang segar dan terjangkau.

Produk-produk yang dipasarkan melalui Petruk Semar mencakup sayuran dan buah-buahan hasil kebun dinas maupun produk panen dari kelompok tani, serta komoditas pertanian lainnya yang telah melalui proses kurasi mutu untuk menjamin kualitas. Truk ini beroperasi secara berpindah ke berbagai lokasi, baik pada event pasar tani, pasar rakyat murah, Semarang Farmers Market, maupun kegiatan pemerintah daerah lainnya agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.

Ke depan, program Petruk Semar direncanakan untuk diperluas operasionalnya ke setiap kecamatan di Kota Semarang. Penyiapan anggaran dan koordinasi teknis diarahkan agar truk ini dapat mendukung urban farming dan kelompok tani agar bisa langsung memasok kebutuhan masyarakat lokal. Melalui inovasi ini pula, diharapkan kendala pemasaran terutama saat panen raya dapat tertangani secara lebih efektif, sehingga target kinerja Dinas Pertanian dalam hal peningkatan akses pasar, stabilitas harga, dan peningkatan pendapatan petani dapat terpenuhi.

g. Penghargaan Perangkat Daerah

Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja, dedikasi, dan inovasi yang telah dilaksanakan, Dinas Pertanian Kota Semarang telah meraih sejumlah penghargaan dari berbagai instansi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan Dinas Pertanian dalam melaksanakan program pembangunan pertanian, pelayanan publik, serta sinergi dengan para pemangku kepentingan. Adapun penghargaan yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

1) Abdibaktitani, 2023

   Pada tahun 2023, Dinas Pertanian Kota Semarang berhasil memperoleh penghargaan Abdibaktitani – Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Utama yang merupakan penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas prestasi Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UPKK) yang berprestasi utama di bidang pertanian. Penghargaan ini diberikan atas kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang dan pelayanan prima yang diberikan (berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur).

2) Pembinaan Higiene Sanitasi menuju Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Terbaik yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas kinerja Dinas Pertanian dalam memberikan rekomendasi NKV terbanyak di Jawa Tengah.

3) Kabupaten/Kota yang telah Menjalin Kerjasama dengan BBPTT dalam Upaya Pengembangan pada Sektor Peternakan (Pembeliaan Bibit Kelinci di Taman Ternak Bandungan) yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas kinerja Dinas Pertanian dalam melakukan pembeliaan bibit kelinci terbanyak di Jawa Tengah.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:

1) Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Semarang, lahan pertanian semakin berkurang karena banyak yang dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, industri, dan infrastruktur. Lahan pertanian yang semakin menyempit menjadi kendala besar bagi produktivitas pertanian.
2) Kota Semarang berada di kawasan pesisir yang rawan terhadap banjir rob (banjir akibat naiknya air laut ke daratan) dan salinitas tanah yang tinggi pada beberapa kawasan persawahan.
3) Kota Semarang menghadapi masalah ketersediaan air yang terbatas, terutama di musim kemarau. Sistem irigasi yang belum optimal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi pertanian.
4) Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Semarang. Curah hujan yang tidak menentu, cuaca ekstrem, dan kenaikan suhu mempengaruhi pola tanam serta kualitas hasil pertanian. Terlebih, banjir rob yang sering melanda pesisir utara Semarang turut mengganggu aktivitas pertanian di kawasan tersebut.
5) Banyak petani di Semarang yang masih menggunakan metode pertanian tradisional. Akses terhadap teknologi modern seperti sistem

pertanian cerdas, teknik hidroponik, atau vertikultur masih terbatas. Minimnya pengetahuan tentang inovasi pertanian juga membatasi kapasitas produksi dan efisiensi hasil tani.

6) Banyak petani di Semarang yang sudah berusia lanjut, sementara generasi muda kurang tertarik untuk melanjutkan usaha di sektor pertanian. Tantangan regenerasi petani ini disebabkan oleh anggapan bahwa pertanian kurang menjanjikan dibandingkan sektor lain seperti perdagangan atau industri.
7) Pengembangan sektor pertanian di Kota Semarang juga menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dan distribusi. Banyak petani kesulitan untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas karena keterbatasan akses transportasi, jaringan distribusi yang belum merata, serta persaingan harga dengan produk impor.
8) Akses terhadap modal usaha bagi para petani kecil di Semarang juga masih menjadi kendala. Investasi di sektor pertanian sering kali dianggap kurang menguntungkan oleh pihak swasta atau perbankan, sehingga para petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha mereka.
9) Pengelolaan limbah dari sektor peternakan seperti kotoran hewan yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan sumber air, sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanian Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Adanya mekanisme Urban Farming (pertanian kota) di atap gedung, pekarangan rumah, atau lahan terbatas dengan menggunakan teknologi pertanian seperti hidroponik atau aquaponik.
2) Tersedianya anggaran Pemerintah Daerah baik melalui APBD Kota Semarang, APBD Provinsi maupun APBN dalam rangka peningkatan sarana, prasana dan SDM pertanian.
3) Tersedianya UPTD Kebun Dinas yang dapat menjadi salah satu alternatif bagi kelompok tani untuk peningkatan pendapatan dan penguatan kapasitas.
4) Pemerintah Kota Semarang memiliki beberapa kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian, termasuk upaya dalam mendorong pertanian perkotaan dan memberikan pelatihan bagi petani. Selain itu, program pemerintah yang terkait dengan ketahanan pangan, pengelolaan lahan, dan pembangunan infrastruktur pertanian membuka peluang bagi pengembangan sektor pertanian secara lebih terencana dan berkelanjutan.
5) Pengembangan sektor agrowisata di Semarang dapat menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan dengan memadukan aktivitas pertanian dan pariwisata sehingga dapat mendiversifikasi sumber pendapatan petani.
6) Penerapan *smart farming* atau pertanian berbasis teknologi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Semarang. Dengan menggunakan sensor, drone, dan sistem manajemen berbasis data, petani dapat memantau kondisi lahan, cuaca, serta kebutuhan tanaman secara real-time.
7) Pengembangan varietas unggul komoditas tanaman pangan seperti padi biosalin yang telah dilaksanakan di lahan sawah yang terdampak

rob di Kecamata Tugu sehingga dapat merubah lahan tidur menjadi lahan produktif.

8) Sektor peternakan juga memiliki peluang besar di Kota Semarang, terutama di kawasan pedesaan. Pengembangan peternakan modern dapat menjadi bagian dari diversifikasi sektor pertanian.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pertanian Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pertanian Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu: “masih rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Rumusan Permasalahan
“Masih rendahnya daya saing sektor pertanian”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian	Pertumbuhan penduduk yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan kawasan permukiman dan industri
		Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif
		Kurangnya kebijakan hukum yang mendukung pemilik lahan pertanian produktif
2	Belum optimalnya produksi pertanian dan peternakan	Terjadi kegagalan panen karena dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman
		Belum optimalnya sarana prasarana pertanian seperti ketersediaan akses pada lahan dan jaringan irigasi yang memadai
		Adanya resiko penyebaran penyakit hewan menular strategis karena Kota Semarang merupakan jalur lalu lintas ternak maupun bahan asal hewal (BAH)
		Belum optimalnya penggunaan teknologi terbarukan di bidang pertanian
3	Minimnya regenerasi petani	Minimnya minat generasi muda untuk berkarir dalam bidang pertanian
		Minimnya inovasi dan akses teknologi di bidang pertanian yang dapat menarik minat generasi muda
		Belum optimalnya kelembagaan petani muda dalam mengembangkan kegiatan pertanian di dalamnya

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
4	Belum optimalnya penanganan pasca panen dan akses pemasaran hasil panen	Rantai distribusi yang tidak efisien dan belum optimalnya fungsi badan usaha milik petani
		Kurangnya pengetahuan petani mengenai Teknik penanganan pasca panen yang baik dan benar
		Keterbatasan sarana prasarana penanganan pasca panen produk

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pertanian Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bidang Prasarana dan Sarana

a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi, yang ditandai dengan masih adanya kerusakan saluran, sedimentasi, dan sistem distribusi air yang belum merata, sehingga menghambat ketersediaan air bagi lahan pertanian.
b. Kurangnya ketersediaan alat dan mesin pertanian (*alsintan*) untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, baik dari segi jumlah maupun kondisi kelayakan, sehingga proses budidaya, panen, dan pascapanen tidak dapat dilakukan secara efisien.
c. Kurangnya ketersediaan alat dan mesin peternakan (*alsinnak*) untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan hewan ternak, termasuk peralatan pakan, sanitasi, dan pengolahan limbah, sehingga produktivitas hasil peternakan belum optimal.

2. Bidang Tanaman Pangan

a. Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya dan pengelolaan lahan pada produksi tanaman pangan, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil.
b. Kurangnya ketersediaan benih unggul bersertifikat serta belum maksimalnya pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, sehingga tingkat kerusakan tanaman masih cukup tinggi.
c. Belum memadainya penanganan pascapanen dan akses pemasaran hasil tanaman pangan, ditandai dengan minimnya fasilitas penyimpanan, pengeringan, dan pemasaran yang efektif.

3. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

a. Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya dan pengelolaan lahan pada produksi hortikultura dan perkebunan, sehingga belum tercapai produktivitas dan kualitas sesuai potensi.
b. Kurangnya ketersediaan benih unggul bersertifikat serta belum maksimalnya pengendalian hama dan penyakit tanaman hortikultura dan perkebunan, yang berakibat pada penurunan kualitas produk.
c. Belum memadainya penanganan pascapanen dan akses pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan, termasuk keterbatasan fasilitas *cold storage* dan jaringan pemasaran modern.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Kurangnya ketersediaan bibit ternak unggul dan pakan berkualitas, sehingga produktivitas ternak dan mutu hasil peternakan belum optimal.
b. Belum maksimalnya upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan menular, ditandai dengan keterbatasan cakupan vaksinasi, sarana deteksi dini, dan tenaga teknis.

c. Belum memadainya penanganan pascapanen dan akses pemasaran hasil peternakan, termasuk keterbatasan fasilitas pengolahan dan rantai distribusi yang efisien.

5. Bidang Penyuluhan Pertanian

a. Belum optimalnya pembinaan dan penguatan kelembagaan petani, sehingga peran kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam peningkatan produktivitas belum maksimal.
b. Kurangnya jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian, yang berdampak pada terbatasnya jangkauan dan kualitas pendampingan kepada petani.
c. Belum maksimalnya pemanfaatan metode penyuluhan modern dan sistem informasi pertanian, sehingga penyebaran inovasi dan teknologi belum merata.

6. Bidang Sekretariat

a. Belum maksimalnya pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah, yang berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya.
b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi umum dan manajemen kepegawaian, sehingga pelayanan internal belum sepenuhnya mendukung kinerja organisasi.
c. Kurang optimalnya integrasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program/kegiatan, sehingga pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya akurat dan komprehensif.

7. UPTD Agrobisnis

a. Kurang optimalnya pengelolaan kebun dinas sebagai pusat pembibitan dan percontohan teknologi pertanian, sehingga kontribusi terhadap penyediaan benih unggul masih terbatas.
b. Belum efektifnya pelayanan pada Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), ditandai dengan keterbatasan fasilitas, peralatan medis, dan tenaga medis hewan, sehingga pelayanan kesehatan hewan belum menjangkau seluruh wilayah.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

1. Telaahan RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, untuk mencapai visi Presiden tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari RPJMN Tahun 2025-2029 adalah untuk mendukung visi berupa: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) misi berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia. Sasaran Presiden Republik Indonesia selama periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju
2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pertanian Kota Semarang mendukung pencapaian sasaran yaitu “kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang”. Upaya ini akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang kompleks dengan berbagai pelaku usaha mulai dari hulu hingga hilir. Sehingga, melalui peningkatan daya saing sektor pertanian ini harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan pada pelaku usaha yang terlibat.

Peningkatan daya saing sektor pertanian di Kota Semarang memiliki relevansi yang erat dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN, yakni “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.

Peningkatan daya saing sektor pertanian di Kota Semarang secara langsung mendukung tercapainya swasembada pangan serta ketahanan pangan nasional. Melalui program-program strategis, seperti penguatan urban farming, penerapan pertanian cerdas (smart farming), diversifikasi pangan lokal, pengembangan agribisnis, serta pemberdayaan kelompok tani dan kelembagaan pertanian, Dinas Pertanian berkontribusi pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil pertanian. Upaya tersebut tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi sektor pertanian sebagai pilar ekonomi daerah.

Dengan demikian, tujuan Dinas Pertanian Kota Semarang selaras dan mendukung arah kebijakan nasional dalam mewujudkan kemandirian bangsa, khususnya melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi hijau. Peningkatan daya saing sektor pertanian akan memperkuat

ketahanan pangan, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kontribusi Kota Semarang dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif"

Visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) pokok visi berikut:

1. Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
2. Pusat Ekonomi yang Berkeadilan dan Inklusif
3. Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
4. Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif

Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi berikut:

1. mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian;
2. mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi;
3. mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak;
4. mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital;
5. mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
6. mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat;
7. mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pertanian Kota Semarang mendukung pencapaian target pembangunan dari pokok visi ke-1 yaitu: “Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif” dan misi ke-4 yaitu: “mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital” pada Tujuan ke-1 yaitu: “meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing”. Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang pertanian, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: “terjaganya stabilitas harga barang dan jasa”. Dinas Pertanian Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target meningkatnya daya saing sektor pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Telaah tujuan dan sasaran pembangunan Renstra Kementerian Pertanian belum dapat dianalisis mengingat Renstra Kementerian Pertanian belum disusun.

4. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan produksi komoditas pertanian dan perkebunan sebagai wujud kontribusi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan produksi Produksi Tanaman Pangan.
2. Terwujudnya peningkatan produksi Produksi Tanaman Hortikultura.
3. Terwujudnya peningkatan produksi Produksi Tanaman Perkebunan.
4. Terwujudnya peningkatan NTP Tanaman Pangan.
5. Terwujudnya peningkatan NTP Tanaman Hortikultura.
6. Terwujudnya peningkatan NTP Tanaman Perkebunan.
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.
8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah.

5. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) subsektor peternakan, dengan indikator laju pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor peternakan;
2. Meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya produksi daging, dengan indikator produksi daging;
2. Tersedianya produksi susu, dengan indikator produksi susu;
3. Tersedianya produksi telur, dengan indikator adalah produksi telur;
4. Meningkatnya nilai tambah produk hasil peternakan, dengan
5. indikator persentase nilai tambah produk hasil ternak.

6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pertanian Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pertanian Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 untuk Kawasan peruntukan pertanian dijabarkan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

   Kawasan pertanian tanaman pangan seluas ±2.602 ha merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari ±1.633 ha Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan ± 969 ha Cadangan Lahan Pertanian Pangan. Kawasan ini meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, dan Tugu.

   Adapun rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan adalah sebagai berikut:

   a. Budidaya tanaman pangan;
   b. Peningkatan sistem irigasi; dan
   c. Pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau.

2. Kawasan Hortikultura

   Kawasan hortikultura seluas ±1.767 ha meliputi wilayah Kecamatan Tembalang, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Genuk, dan Banyumanik. Rencana pengembangan kawasan hortikultura adalah:

   a. Budidaya tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman tahunan; dan
   b. Pengembangan *agroforestry*.

Berdasarkan Pasal 119 (22) ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Pada kawasan tanaman pertanian
    a. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan
    b. diperbolehkan kegiatan pendukung pertanian;
    c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya; dan
    d. dilarang kegiatan yang mengurangi atau merusak kualitas tanah; dan
    e. dilarang pembangunan kegiatan terbangun yang tidak terkait dengan pertanian tanaman pangan.
2. Pada kawasan hortikultura
    a. diarahkan untuk budi daya hortikultura;
    b. diperbolehkan pemanfaatan untuk tanaman pangan;
    c. diperbolehkan pemanfaatan untuk perkebunan atau kehutanan;
    d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk peternakan dan perikanan;
    e. diperbolehkan pemanfaatan untuk bangunan pengolah hasil pertanian dan kehutanan; dan
    f. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya.

Tabel 2. 11 Indikasi Program yang Berkaitan dengan Dinas Pertanian

No	Program Utama	Lokasi	Waktu	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
II	Perwujudan Pola Ruang				
B	Kawasan Budidaya				
11	Kawasan Pertanian				
	- Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Tugu	2020-2030	APBD	Dinas Pertanian
	- Pengembangan kawasan pertanian hortikultura	Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan	2020-2030	APBD	Dinas Pertanian

7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Salah satu poin penting dalam penyusunan KLHS adalah melihat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hasil identifikasi Indikator TPB Kota Semarang Tahun 2022 sebanyak 196 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, jumlah indikator yang telah dilaksanakan sebanyak 129 indikator atau 65,15% telah mencapai target TPB yang ditetapkan oleh Kota Semarang melalui forum RAD SDG's. Sedangkan, sebanyak 49 indikator atau 24,75% diantaranya belum mencapai target yang ditetapkan. Terdapat juga 4 indikator atau 2,02% yang belum dilaksanakan. Sementara itu sebanyak 16 indikator atau 8,08% memiliki isu data berupa ketiadaan data yang valid maupun ketiadaan sumber daya data.

Pelaksanaan capaian indikator TPB dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan Hidup, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Berikut rincian capaian TPB dan Isu Strategis di setiap pilar pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah terkait pada Pilar Sosial. Sasaran strategis pada Pilar Sosial meliputi pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan kesehatan, serta meningkatkan pendidikan dan kesetaraan gender. Pada isu kemiskinan, sasaran strategis yang utama adalah peningkatan upaya ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan dan peningkatan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

Tabel 2. 12
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan - Masih kurangnya kesetaraan gender - Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dan perempuan	1. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender
Belum optimalnya distribusi kesejahteraan	2. Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah
Masih kurangnya kontribusi sektor terhadap kesejahteraan	
Belum optimalnya dukungan sektor keuangan	
Masih kurangnya dukungan industri hijau	

Tabel 2. 13
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*)	-	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	5	Strategi: 1. Meningkatkan upaya ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan 2. Meningkatkan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat miskin	Program: 1.a Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 1.b Program peningkatan dan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 1.c Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2.a Program Pemberdayaan Sosial 2.b Program Rehabilitasi Sosial

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang

Penentuan isu-isu strategis merupakan tahapan penting dalam perumusan rencana pembangunan sektor pertanian di Kota Semarang. Identifikasi isu strategis tidak hanya didasarkan pada tantangan teknis pertanian, tetapi juga harus memperhatikan keterkaitannya dengan agenda pembangunan yang lebih luas, termasuk Pengarusutamaan Gender (PUG), Kota Layak Anak, percepatan penurunan stunting, serta pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan peran sektor pertanian yang bersentuhan langsung dengan ketersediaan pangan, gizi keluarga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang perlu dirumuskan secara komprehensif, agar mampu menjawab tantangan lintas sektor sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

   Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi penting dalam pembangunan daerah, termasuk di bidang pertanian. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta berbagai regulasi turunan yang mengedepankan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.

   Di sektor pertanian, peran perempuan sangat signifikan, baik sebagai tenaga kerja maupun pengelola usaha tani, peternakan, maupun kegiatan

pascapanen. Namun demikian, kontribusi perempuan kerap kurang terlihat dan belum sepenuhnya diakomodasi dalam perencanaan serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender di bidang pertanian di Kota Semarang diarahkan untuk:

1. Meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya produksi pertanian, pelatihan, dan teknologi.
2. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kelompok tani, gapoktan, maupun kelembagaan pertanian lainnya.
3. Menjamin adanya kesempatan yang setara dalam memperoleh manfaat program pertanian, termasuk akses permodalan, bantuan sarana produksi, serta pemasaran hasil pertanian.
4. Memperkuat kapasitas aparatur dan kelembagaan pertanian dalam menerapkan analisis gender serta penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan pertanian di Kota Semarang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki dapat berperan secara seimbang dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kerangka pembangunan daerah yang menempatkan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, ramah, dan inklusif bagi tumbuh kembang anak melalui integrasi prinsip KLA dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor pertanian. Hal ini penting mengingat anak tidak hanya berhak atas perlindungan dan layanan dasar, tetapi juga perlu diberikan ruang edukasi, partisipasi, serta lingkungan hidup yang mendukung kesejahteraan jangka panjang.

Dalam konteks bidang pertanian, Dinas Pertanian Kota Semarang berperan aktif mendukung terwujudnya KLA dengan berbagai upaya strategis, antara lain:

1. Pendidikan dan Literasi Pertanian Sejak Dini, melalui program sekolah lapang, demplot edukasi, dan kegiatan kunjungan belajar ke kebun/pertanian kota, sehingga anak dapat mengenal pangan sehat, gizi seimbang, dan pentingnya keberlanjutan lingkungan.
2. Penguatan Ketahanan Pangan Ramah Anak, dengan mendorong penyediaan bahan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi keluarga, sebagai salah satu bentuk perlindungan hak anak atas kesehatan dan kecukupan gizi.
3. Pengembangan Ruang Publik Edukatif, seperti urban farming, kebun gizi, dan taman hortikultura yang ramah anak, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi tetapi juga sebagai media pembelajaran dan rekreasi sehat bagi anak.
4. Pemberdayaan Keluarga Petani, melalui peningkatan peran perempuan tani dalam kelompok tani dan usaha produktif, sehingga kesejahteraan

keluarga meningkat dan anak-anak dalam rumah tangga petani memperoleh akses pendidikan, gizi, dan kesehatan yang lebih baik.

Melalui langkah-langkah tersebut, pembangunan pertanian di Kota Semarang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, tetapi juga mendukung pemenuhan hak anak. Dengan demikian, sektor pertanian dapat menjadi bagian integral dalam mewujudkan Kota Semarang yang layak anak, di mana generasi muda tumbuh sehat, cerdas, berdaya saing, serta memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan pangan dan lingkungan.

3. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu strategis pembangunan di Kota Semarang meskipun tren angka kemiskinan menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi bukan hanya terkait keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga rendahnya daya saing ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja di sektor-sektor produktif. Dalam konteks ini, sektor pertanian memiliki peran penting karena tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran kota dan perdesaan.

Dinas Pertanian Kota Semarang telah mengarahkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Penguatan Urban Farming, sebagai strategi untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap sumber pangan sehat sekaligus menambah pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan sempit di perkotaan.
2. Pengembangan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani, guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam budidaya tanaman, peternakan, dan perikanan, serta memperkuat kelembagaan ekonomi lokal.
3. Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian, seperti penyediaan benih, bibit, pupuk, dan peralatan sederhana, yang ditujukan untuk meringankan beban biaya produksi petani kecil dan masyarakat rentan.
4. Program Pertanian Terpadu di Sekolah dan Komunitas, yang selain berfungsi sebagai edukasi generasi muda, juga memberi dampak ekonomi melalui pemanfaatan hasil panen untuk konsumsi keluarga maupun penjualan.
5. Pengembangan Agrowisata dan Diversifikasi Usaha Pertanian, yang membuka peluang usaha baru, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat sekitar.

Melalui program-program tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang berupaya menjadikan pertanian sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat ketahanan pangan, membuka akses lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam usaha tani dan agribisnis, diharapkan angka kemiskinan di Kota Semarang dapat terus ditekan, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan sosial.

4. Stunting

Stunting masih menjadi salah satu tantangan pembangunan sumber daya manusia di Kota Semarang. Kondisi ini mencerminkan adanya masalah gizi kronis yang dapat berdampak pada kualitas kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas generasi mendatang. Pemerintah Kota Semarang menempatkan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas, sejalan dengan kebijakan nasional percepatan penurunan stunting, melalui pendekatan multisektor yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendukung upaya penanganan stunting, Dinas Pertanian Kota Semarang berperan penting dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan yang bergizi, aman, serta terjangkau bagi masyarakat. Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengembangan Urban Farming dan Kebun Gizi di sekolah, posyandu, dan lingkungan masyarakat sebagai sumber pangan sehat dan bergizi yang dapat langsung dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, khususnya balita dan ibu hamil.
2. Fasilitasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) melalui pemberdayaan kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran, buah-buahan, dan tanaman sumber protein nabati.
3. Diversifikasi Pangan Bergizi, dengan mendorong produksi lokal seperti sayuran, ikan air tawar, dan ayam KUB, yang berkontribusi pada peningkatan konsumsi protein hewani maupun nabati masyarakat.
4. Edukasi Pangan Sehat dan Gizi Seimbang melalui kegiatan pertanian terpadu di sekolah serta kolaborasi dengan kader PKK dan posyandu, untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi pangan bergizi. Selain itu melalui kegiatan GERIMIS LUR (Gerakan Minum Susu dan Makan Telur) serta GEMAS BUN (Gerakan Makan Sayur dan Buah Nusantara) juga merupakan upaya edukasi pangan sehat dan gizi seimbang bagi anak-anak di Kota Semarang.
5. Penyediaan Bantuan Sarana Pertanian dan Peternakan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat rentan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian pangan dan menurunkan risiko kerentanan gizi.

Dengan langkah-langkah tersebut, sektor pertanian di Kota Semarang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga berkontribusi langsung pada upaya perbaikan gizi masyarakat. Integrasi program pertanian dengan intervensi kesehatan dan pendidikan menjadi strategi kunci dalam mempercepat penurunan angka stunting. Dengan demikian, Dinas Pertanian turut mendukung terwujudnya generasi Kota Semarang yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2. 14
Isu Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- Lokasi Kota Semarang yang menjadi hub bagi daerah di sekitarnya menjadi peluang pengembangan agrowisata - Adanya dukungan kebijakan pertanian perkotaan untuk mendukung ketahanan pangan dan mengendalikan laju inflasi - Pengembangan varietas unggul komoditas tanaman pangan seperti padi biosalin dapat merubah lahan tidur menjadi lahan produktif - Terlaksananya praktik urban farming di 177 kelurahan - Smart farming dan alsintan yang mulai digunakan pada beberapa lahan budidaya - Adanya Duta Petani Milenial dan Petani Andalan yang dapat mendorong lahirnya regenerasi petani	- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian - Belum optimalnya produksi pertanian dan peternakan - Belum optimalnya regenerasi petani - Belum optimalnya penanganan pasca panen dan akses pemasaran hasil panen	Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan	- Perubahan iklim dan ketahanan iklim (*climate resilience*) yang berdampak pada terjadinya banjir rob dan penurunan muka tanah di Kota Semarang sehingga mempengaruhi lahan pertanian produktif yang ada. - Urbanisasi dan ketahanan pangan perkotaan - Regenerasi petani dan bonus demografi - Krisis pangan global dan gangguan rantai pasok - Digitalisasi dan inovasi teknologi pertanian *(agri-tech)* - *Sustainable Development Goals (SDGs*) pada *goal 2* yaitu : *zero hunger*	- Ketahanan pangan sebagai prioritas nasional yang sejajar dengan target pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas SDM - Transformasi pertanian tradisional ke modern - Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian - Hilirisasi pangan dan nilai tambah produk agrikultur - Dukungan infrastruktur dan vokasi SDM pertanian	- Ketahanan pangan yang berkelanjutan - Pengembangan infrastruktur pertanian dan irigasi - Transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau dan biru - Hilirisasi, digitalisasi dan inovasi pertanian - Peningkatan daya saing Kota melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan dan sumber daya manusia	- Terbatasnya ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian produktif - Belum optimalnya produksi dan daya saing hasil pertanian dan peternakan - Krisis regenerasi petani dan kesenjangan SDM pertanian - Lemahnya sistem pascapanen dan akses pemasaran petani

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang (data diolah)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Pertanian Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Pertanian. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pertanian Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya daya saing sektor pertanian"

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa	Meningkatnya daya saing sektor pertanian		Nilai produksi pertanian	rupiah	171.723.064.900	171.728.951.000	172.161.573.050	172.594.078.323	173.030.581.521	173.461.738.959	Nilai ekonomi dari seluruh hasil pertanian yang dihasilkan dalam satu tahun (harga komoditas dikalikan dengan jumlah produksi dalam satu tahun)
		Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian	Rata-rata produktivitas tanaman pangan	ton/ha	7,84	7,88	7,93	7,98	8,04	8,09	Jumlah hasil produksi (setara ton gkp) Padi, Jagung, Singkong dibagi dengan luas panen (dalam ha) Padi, Jagung, dan Singkong per tahun
			Rata-rata produktivitas tanaman hortikultura	kuintal/ ha	17,25	17,39	17,53	17,66	17,80	17,94	Jumlah hasil produksi (dalam kwintal) Cabai, Bawang Merah, Tomat, Terong dibagi dengan luas panen (dalam ha) Cabai, Bawang Merah, Tomat, Terong per tahun
			Rata-rata produktivitas hasil peternakan	kg/ ekor	87,18	87,37	87,56	87,76	87,95	88,14	Rata-rata produktivitas telur, daging ayam, dan daging sapi (dalam kg per ekor)
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian	angka	80	80,2	80,4	80,6	80,8	81	Nilai AKIP Dinas Pertanian
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian	angka	82,33	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Pertanian

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pertanian Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Peningkatan infrastruktur pertanian untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	Penguatan infrastruktur pertanian dan penguatan SDM pertanian untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	Pemantapan infrastruktur, penguatan SDM dan peningkatan mutu, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	Pemantapan infrastruktur, peningkatan kualitas produksi melalui penanganan pasca panen untuk memberikan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	Perwujudan hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan yang optimal untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian di Kota Semarang

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pertanian Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa	Penguatan ketahanan pangan kota	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana lahan dan irigasi pertanian	DPU, Distaru, BPN, Dispertan Prov.
			Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pertanian	Dispertan Prov, BRMP, DLH.
			Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Dispertan Prov, BRMP, Balitbangnak.
			Peningkatan kualitas pembenihan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Dispertan Prov, BRMP, BMKG.
			Peningkatan kualitas pasca panen dan optimalisasi pemasaran tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Dispertan Prov, BRMP.
			Peningkatan kualitas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dispertan Prov, BBVet, BBPKH
			Peningkatan kualitas kelembagaan kelompok tani	Dispertan Prov, BBPP
			Peningkatan kualitas ketenagaan penyuluh pertanian	Dispertan Prov, BBPP
			Peningkatan kualitas metode dan informasi penyuluhan	Dispertan Prov, BBPP

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pertanian Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pertanian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa	Meningkatnya daya saing sektor pertanian				Nilai produksi pertanian		Kepala Dinas
		Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian			Rata-rata produktivitas tanaman pangan		Kepala Dinas
					Rata-rata produktivitas tanaman hortikultura		
					Rata-rata produktivitas hasil peternakan		
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan		Jumlah produksi tanaman pangan	3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kabid Tanaman Pangan
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi hortikultura dan perkebunan		Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan		Kabid Hortikultura dan Perkebunan
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi peternakan		Jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging		Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu		
			Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk mendukung produksi pertanian		Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian		Kabid Prasarana dan Sarana
				Tersedianya alsintan untuk mendukung usaha tani dan peternakan	Jumlah alsintan yang disediakan	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Subkoor Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		
				Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan		Subkoor Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan
				Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi tanaman pangan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Tanaman Pangan		Subkoor Produksi Tanaman Pangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan		Subkoor Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan
				Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Hortikultura dan Perkebunan		Subkoor Produksi Hortikultura dan Perkebunan
				Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan		Subkoor Pasca Panen dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan
				Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan		Subkoor Pasca Panen dan Pemasaran Peternakan
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bibit yang dihasilkan kebun dinas Jumlah hasil produksi pertanian kebun dinas	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka UPTD Agrobisnis
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peternak yang Memberikan Pakan Ternak Tambahan	3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Produksi dan Pengembangan Peternakan
				Terlaksananya Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan di tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Subkoor Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Terlaksananya Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
				Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak yang Disebarkan Untuk Pengembangan Populasi Ternak	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Lain	Subkoor Produksi dan Pengembangan Peternakan
				Terlaksananya Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Dasar Pertanian	3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabid Prasarana dan Sarana
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Pertanian	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Subkoor Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasidan SinkronisasiPrasaranaPendukungPertanian Lainnya	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi yang dibangun atau direhabilitasi	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Subkoor Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi
				Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dibangun atau direhabilitasi		Subkoor Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan yang dibangun atau direhabilitasi		Subkoor Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
				Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			strategis dan zoonosis	Terjaminnya Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Area atau Daerah yang Terdapat Kasus Penyakit Hewan Menular	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan hewan dan produk hewan yang keluara maupun masuk wilayah Kota Semarang	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
					Jumlah Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Subkoor Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usahaproduk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	3.27.04.2.04.0005 PembinaanPenerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
				Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	
				Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
				Terlaksananya Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi komoditas tanaman pangan dari bencana pertanian		Persentase Bencana Pertanian Berupa Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim yang Dapat Dikendalikan pada Tanaman Pangan	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kabid Tanaman Pangan
			Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi komoditas hortikultura dan perkebunan dari bencana pertanian		Persentase Bencana Pertanian Berupa Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim yang Dapat Dikendalikan pada Hortikultura dan Perkebunan		Kabid Hortikultura dan Perkebunan
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas tanaman pangan	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Pangan	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten dan Kota	Subkoor Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Hortikultura dan Perkebunan		Subkoor Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Kabid Penyuluhan
				Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	Kualitas kelembagaan kelompok tani	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Subkoor Kelembagaan
				Meningkatnya kinerja balai penyuluh pertanian	Kinerja Balai Penyuluh Pertanian		Subkoor Ketenagaan
				Meningkatnya penyusunan/pemutakhiran serta diseminasi metode dan informasi penyuluhan pertanian	Persentase penyusunan/ pemutakhiran materi penyuluhan		Subkoor Metode dan Informasi
					Jumlah kegiatan diseminasi informasi		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
				Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian		Kepala Dinas
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian		Kepala Dinas
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pertanian		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas	3.27.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian		
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja & keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoor Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	3.27.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pertanian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pertanian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pertanian	3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.27.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian yang selesai ditindaklanjuti	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian sesuai ketentuan	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Perangkat Daerah Dinas Pertanian mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu :

1. Penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan
2. Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
3. Penguatan lumbung pangan dan urban farming
4. Pembentukan BUMP
5. Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
6. Peningkatan keterjangkauan akses pangan yang beragam dan berkualitas
7. Penguatan petani milenial
8. Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan

Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	Penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
2	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan		3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
3	Penguatan lumbung pangan dan urban farming		3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
4	Pembentukan BUMP		3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
5	Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah		3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
6	Peningkatan keterjangkauan akses pangan yang beragam dan berkualitas		3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
7	Penguatan petani milenial	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
8	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan	Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian terdapat pada lampiran Tabel 4.2.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Pertanian
Kota Semarang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27 Dinas Pertanian				39.357.181.513		43.691.365.427		45.577.804.008		45.924.315.972		46.741.665.930	
3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				10.534.774.064		11.649.307.070		12.134.403.713		12.223.509.073		12.433.690.164	
Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman pangan	22788,8 ton	27536 ton	1.526.288.074	27604,84 ton	1.687.762.675	27673,85 ton	1.758.043.938	27743,04 ton	1.770.953.607	27812,39 ton	1.801.404.843	Kabid Tanaman Pangan
Meningkatnya produksi hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan	27730,38 ton	26226,29 ton	5.799.893.524	26486,04 ton	6.413.496.884	26748,37 ton	6.680.565.628	27013,33 ton	6.729.622.361	27280,93 ton	6.845.337.036	Kabid Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging	32173,89 kg	32495,63 kg	1.512.257.862	32820,59 kg	1.672.248.128	33148,79 kg	1.741.883.339	33480,28 kg	1.754.674.337	33815,08 kg	1.784.845.654	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur	7976,85 kg	8016,73 kg		8056,82 kg		8097,10 kg		8137,59 kg		8178,27 kg		
	Jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu	1397,3 liter	1587,98 liter		1667,38 liter		1750,75 liter		1838,29 liter		1930,20 liter		
Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	77,70%	78%	1.696.334.603	79%	1.875.799.383	80%	1.953.910.808	81%	1.968.258.767	82%	2.002.102.631	Kabid Prasarana dan Sarana
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				6.884.474.851		7.612.822.170		7.929.832.826		7.988.063.179		8.125.416.522	
Tersedianya alsintan untuk mendukung usaha tani dan peternakan	Jumlah alsintan yang disediakan	42 unit	5 unit	681.563.010	7 unit	753.669.395	8 unit	785.053.450	7 unit	790.818.255	7 unit	804.416.236	Subkoor Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	4 kelompok tani	2 kelompok tani	645.763.741	2 kelompok tani	714.082.720	3 kelompok tani	743.818.319	4 kelompok tani	749.280.326	4 kelompok tani	762.164.070	Subkoor Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan	4 kelompok tani	2 kelompok tani	369.007.852	2 kelompok tani	408.047.268	2 kelompok tani	425.039.039	4 kelompok tani	428.160.186	4 kelompok tani	435.522.326	Subkoor Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi tanaman pangan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Tanaman Pangan	10 kelompok tani	9 kelompok tani	1.249.532.185	10 kelompok tani	1.381.727.224	10 kelompok tani	1.439.264.658	10 kelompok tani	1.449.833.467	10 kelompok tani	1.474.763.099	Subkoor Produksi Tanaman Pangan
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan	3 kelompok tani	2 kelompok tani	276.755.889	2 kelompok tani	306.035.451	3 kelompok tani	318.779.280	3 kelompok tani	321.120.140	3 kelompok tani	326.641.744	Subkoor Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Hortikultura dan Perkebunan	16 kelompok tani	16 kelompok tani	2.416.450.673	16 kelompok tani	2.672.100.582	16 kelompok tani	2.783.371.322	16 kelompok tani	2.803.810.176	16 kelompok tani	2.852.021.199	Subkoor Produksi Hortikultura dan Perkebunan
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan	4 kelompok tani	2 kelompok tani	922.519.630	3 kelompok tani	1.020.118.171	3 kelompok tani	1.062.597.599	3 kelompok tani	1.070.400.466	4 kelompok tani	1.088.805.814	Subkoor Pasca Panen dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan	4 kelompok tani	2 kelompok tani	322.881.871	3 kelompok tani	357.041.360	3 kelompok tani	371.909.160	3 kelompok tani	374.640.163	4 kelompok tani	381.082.035	Subkoor Pasca Panen dan Pemasaran Peternakan
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2.271.876.701		2.512.231.316		2.616.844.833		2.636.060.849		2.681.387.452	
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	47 laporan	39 laporan	2.271.876.701	40 laporan	2.512.231.316	40 laporan	2.616.844.833	40 laporan	2.636.060.849	40 laporan	2.681.387.452	
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4.612.598.150		5.100.590.854		5.312.987.994		5.352.002.330		5.444.029.070	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	94 laporan	39 laporan	4.612.598.150	39 laporan	5.100.590.854	39 laporan	5.312.987.994	39 laporan	5.352.002.330	39 laporan	5.444.029.070	
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota				2.460.923.221		2.721.278.132		2.834.596.707		2.855.411.719		2.904.510.022	Ka UPTD Agrobisnis
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bibit yang dihasilkan kebun dinas	6000 bibit	6100 bibit	2.460.923.221	6200 bibit	2.721.278.132	6300 bibit	2.834.596.707	6400 bibit	2.855.411.719	6500 bibit	2.904.510.022	
	Jumlah hasil produksi pertanian kebun dinas	19000 kg	19100 kg		19200 kg		19300 kg		19400 kg		19500 kg		
3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2.460.923.221		2.721.278.132		2.834.596.707		2.855.411.719		2.904.510.022	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 dokumen	6 dokumen	2.460.923.221	6 dokumen	2.721.278.132	6 dokumen	2.834.596.707	6 dokumen	2.855.411.719	6 dokumen	2.904.510.022	
3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				443.513.988		490.435.828		510.858.396		514.609.732		523.458.356	Subkoor Produksi dan Pengembangan Peternakan
Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peternak yang Memberikan Pakan Ternak Tambahan	50%	62%	443.513.988	64%	490.435.828	66%	510.858.396	68%	514.609.732	70%	523.458.356	
3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				443.513.988		490.435.828		510.858.396		514.609.732		523.458.356	
Terlaksananya Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	9 laporan	10 laporan	443.513.988	10 laporan	490.435.828	10 laporan	510.858.396	10 laporan	514.609.732	10 laporan	523.458.356	
3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				23.176.503		25.628.476		26.695.688		26.891.720		27.354.118	Subkoor Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan di tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	NA	35%	23.176.503	37%	25.628.476	40%	26.695.688	43%	26.891.720	45%	27.354.118	
3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				23.176.503		25.628.476		26.695.688		26.891.720		27.354.118	
Terlaksananya Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	-	13 laporan	23.176.503	13 laporan	25.628.476	13 laporan	26.695.688	13 laporan	26.891.720	13 laporan	27.354.118	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Lain				722.685.501		799.142.465		832.420.095		838.532.722		852.951.145	Subkoor Produksi dan Pengembangan Peternakan
Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak yang Disebarkan Untuk Pengembangan Populasi Ternak	770 ekor	450 ekor	722.685.501	500 ekor	799.142.465	550 ekor	832.420.095	600 ekor	838.532.722	650 ekor	852.951.145	
3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain				722.685.501		799.142.465		832.420.095		838.532.722		852.951.145	
Terlaksananya Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	770 ekor	450 ekor	722.685.501	450 ekor	799.142.465	450 ekor	832.420.095	450 ekor	838.532.722	450 ekor	852.951.145	
3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				3.910.388.297		4.324.090.271		4.504.152.626		4.537.227.522		4.615.244.353	Kabid Prasarana dan Sarana
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Dasar Pertanian	20,26%	22,70%	3.910.388.297	24,52%	4.324.090.271	26,48%	4.504.152.626	28,60%	4.537.227.522	31,88%	4.615.244.353	
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian				234.623.298		259.445.416		135.124.579		136.116.826		138.457.331	Subkoor Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi
Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Pertanian	-	2 dokumen	234.623.298	2 dokumen	259.445.416	1 dokumen	135.124.579	1 dokumen	136.116.826	1 dokumen	138.457.331	
3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				234.623.298		259.445.416		135.124.579		136.116.826		138.457.331	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	2 dokumen	234.623.298	2 dokumen	259.445.416	1 dokumen	135.124.579	1 dokumen	136.116.826	1 dokumen	138.457.331	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian				3.675.764.999		4.064.644.855		4.369.028.047		4.401.110.696		4.476.787.022	
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi yang dibangun atau direhabilitasi	3 unit	16 unit	1.562.200.125	16 unit	1.422.625.699	18 unit	1.966.062.621	16 unit	1.672.422.065	16 unit	1.701.179.069	Subkoor Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dibangun atau direhabilitasi	4 unit	2 unit	977.753.490	5 unit	1.239.716.681	3 unit	1.157.792.433	3 unit	1.289.525.434	3 unit	1.311.698.598	Subkoor Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan yang dibangun atau direhabilitasi	5 unit	4 unit	1.135.811.385	7 unit	1.402.302.475	6 unit	1.245.172.993	6 unit	1.439.163.198	5 unit	1.463.909.356	Subkoor Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1.176.244.800		1.219.393.456		1.310.708.414		1.320.333.209		1.343.036.107	
Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	8 unit	1.176.244.800	8 unit	1.219.393.456	8 unit	1.310.708.414	8 unit	1.320.333.209	8 unit	1.343.036.107	
3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				-		-		436.902.805		-		-	
Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	-	-	-	-	2 unit	436.902.805	-	-	-	-	
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				1.102.729.500		1.422.625.699		1.092.257.012		1.408.355.423		1.432.571.847	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24 unit	6 unit	1.102.729.500	12 unit	1.422.625.699	9 unit	1.092.257.012	9 unit	1.408.355.423	8 unit	1.432.571.847	
3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				1.396.790.700		1.422.625.699		1.529.159.817		1.672.422.065		1.701.179.069	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 unit	8 unit	1.396.790.700	8 unit	1.422.625.699	8 unit	1.529.159.817	8 unit	1.672.422.065	8 unit	1.701.179.069	
3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1.089.413.139		1.204.668.283		1.254.832.686		1.264.047.175		1.285.782.244	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-53,92%	-5%	1.089.413.139	-5%	1.204.668.283	-5%	1.254.832.686	-5%	1.264.047.175	-5%	1.285.782.244	
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				610.071.358		674.614.238		702.706.304		707.866.418		720.038.057	Subkoor Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Terjaminnya Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Area atau Daerah yang Terdapat Kasus Penyakit Hewan Menular	12 kelurahan	14 kelurahan	610.071.358	13 kelurahan	674.614.238	12 keluaraha n	702.706.304	11 kelurahan	707.866.418	10 kelurahan	720.038.057	
3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				610.071.358		674.614.238		702.706.304		707.866.418		720.038.057	
Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	12 laporan	12 laporan	610.071.358	12 laporan	674.614.238	12 laporan	702.706.304	12 laporan	707.866.418	12 laporan	720.038.057	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				60.304.571		72.280.097		75.289.961		75.842.830		77.146.935	Subkoor Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan hewan dan produk hewan yang keluar maupun masuk wilayah Kota Semarang	100%	100%	60.304.571	100%	72.280.097	100%	75.289.961	100%	75.842.830	100%	77.146.935	
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	4 kegiatan	12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan		
3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				36.182.743		43.368.058		45.173.977		45.505.698		46.288.161	
Terlaksananya Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-	12 laporan	36.182.743	12 laporan	43.368.058	12 laporan	45.173.977	12 laporan	45.505.698	12 laporan	46.288.161	
3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan				24.121.829		28.912.039		30.115.984		30.337.132		30.858.774	
Terlaksananya Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	-	12 laporan	24.121.829	12 laporan	28.912.039	12 laporan	30.115.984	12 laporan	30.337.132	12 laporan	30.858.774	
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				419.037.210		457.773.948		476.836.421		480.337.927		488.597.253	Subkoor Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet	100%	96%	419.037.210	97%	457.773.948	97%	476.836.421	98%	480.337.927	98%	488.597.253	Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				305.897.163		375.374.637		348.090.587		393.877.099		400.649.747	
Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	34 laporan	12 laporan	305.897.163	12 laporan	375.374.637	12 laporan	348.090.587	12 laporan	393.877.099	12 laporan	400.649.747	
3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				33.522.977		36.621.916		38.146.914		38.427.034		39.087.780	
Terlaksananya Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	-	35 unit usaha	33.522.977	40 unit usaha	36.621.916	40 unit usaha	38.146.914	45 unit usaha	38.427.034	45 unit usaha	39.087.780	
3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan				37.713.349		-		42.915.278		-		-	
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	2 orang	37.713.349	-	-	2 orang	42.915.278	-	-	-	-	
3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				35.618.163		38.910.786		40.531.096		40.828.724		41.530.766	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	-	35 produk	35.618.163	40 produk	38.910.786	40 produk	40.531.096	45 produk	40.828.724	45 produk	41.530.766	
3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				- 100.568.930		- 68.666.092		- 114.440.741		- 72.050.689		- 73.289.588	
Terlaksananya Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	-	35 unit usaha	- 100.568.930	40 unit usaha	- 68.666.092	40 unit usaha	- 114.440.741	45 unit usaha	- 72.050.689	45 unit usaha	- 73.289.588	
3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				204.525.666		226.163.586		235.581.416		237.311.338		241.391.865	
Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada tanaman pangan	Persentase Bencana Pertanian Berupa Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim yang Dapat Dikendalikan pada Tanaman Pangan	100%	90%	143.167.966	90%	158.314.510	90%	164.906.991	95%	166.117.937	95%	168.974.306	Kabid Tanaman Pangan
Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada hortikultura dan perkebunan	Persentase Bencana Pertanian Berupa Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim yang Dapat Dikendalikan pada Hortikultura dan Perkebunan	100%	90%	61.357.700	90%	67.849.076	90%	70.674.425	95%	71.193.401	95%	72.417.560	Kabid Hortikultura dan Perkebunan
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten dan Kota				204.525.666		226.163.586		235.581.416		237.311.338		241.391.865	
Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas tanaman pangan	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Pangan	24 kelompok tani	25 kelompok tani	143.167.966	25 kelompok tani	158.314.510	27 kelompok tani	164.906.991	27 kelompok tani	166.117.937	27 kelompok tani	168.974.306	Subkoor Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	10 kelompok tani	11 kelompok tani	61.357.700	11 kelompok tani	67.849.076	12 kelompok tani	70.674.425	12 kelompok tani	71.193.401	12 kelompok tani	72.417.560	Subkoor Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				121.692.771		134.567.334		140.170.943		141.200.246		143.628.160	
Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	105 ha	100 ha	121.692.771	100 ha	134.567.334	100 ha	140.170.943	100 ha	141.200.246	100 ha	143.628.160	
3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				21.475.195		23.747.177		24.736.049		24.917.690		25.346.146	
Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-	20 ha	21.475.195	20 ha	23.747.177	20 ha	24.736.049	20 ha	24.917.690	20 ha	25.346.146	
3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian				1.028.810.079		1.137.653.685		1.185.027.488		1.193.729.383		1.214.255.350	Kabid Penyuluhan
Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	-	2%	1.028.810.079	2%	1.137.653.685	2%	1.185.027.488	2%	1.193.729.383	2%	1.214.255.350	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.028.810.079		1.137.653.685		1.185.027.488		1.193.729.383		1.214.255.350	
Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	Jumlah kelembagaan kelompok tani yang berkualitas	NA	5 kelompok tani	668.726.551	6 kelompok tani	836.175.458	7 kelompok tani	770.267.867	8 kelompok tani	775.924.099	9 kelompok tani	789.265.978	Subkoordinator Kelembagaan
Meningkatnya kinerja balai penyuluh pertanian	Persentase kinerja Balai Penyuluh Pertanian	NA	100%	179.095.407	100%	130.830.174	100%	177.754.123	100%	179.059.407	100%	182.138.303	Subkoordinator Ketenagaan
Meningkatnya penyusunan/pemutakhiran serta diseminasi metode dan informasi penyuluhan pertanian	Persentase penyusunan/ pemutakhiran materi penyuluhan	NA	100%	205.762.016	100%	170.648.053	100%	237.005.498	100%	238.745.877	100%	242.851.070	Subkoordinator Metode dan Informasi
	Jumlah kegiatan diseminasi informasi	NA	5 kegiatan		5 kegiatan		5 kegiatan		5 kegiatan		5 kegiatan		
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				179.095.407		130.830.174		177.754.123		179.059.407		182.138.303	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 unit	5 unit	179.095.407	5 unit	130.830.174	5 unit	177.754.123	5 unit	179.059.407	5 unit	182.138.303	
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				668.726.551		682.592.211		770.267.867		775.924.099		789.265.978	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 unit	50 unit	668.726.551	50 unit	682.592.211	50 unit	770.267.867	50 unit	775.924.099	50 unit	789.265.978	
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				30.864.302		34.129.611		35.550.825		35.811.881		36.427.661	
Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 unit	2 unit	30.864.302	2 unit	34.129.611	2 unit	35.550.825	2 unit	35.811.881	2 unit	36.427.661	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				-		153.583.247		-		-		-	
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	-	-	-	1 unit	153.583.247	-	-	-	-	-	-	
3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				174.897.713		136.518.442		201.454.673		202.933.995		206.423.410	
Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-	5 dokumen	174.897.713	5 dokumen	136.518.442	5 dokumen	201.454.673	5 dokumen	202.933.995	5 dokumen	206.423.410	
3.27.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				22.589.270.268		25.149.482.532		26.263.806.079		26.468.491.481		26.951.301.954	Sekretaris
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pertanian	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas	100%	100%	22.589.270.268	100%	25.149.482.532	100%	26.263.806.079	100%	26.468.491.481	100%	26.951.301.954	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.500.000		11.500.000		11.500.000		11.500.000		51.500.000	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja & keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas	27 dokumen	30 dokumen	11.500.000	30 dokumen	11.500.000	30 dokumen	11.500.000	30 dokumen	11.500.000	31 dokumen	51.500.000	
3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	7 dokumen	1.500.000	7 dokumen	1.500.000	7 dokumen	1.500.000	7 dokumen	1.500.000	8 dokumen	1.500.000	
3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	
3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	
3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	
3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	
3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 laporan	22 laporan	3.000.000	22 laporan	3.000.000	22 laporan	3.000.000	22 laporan	3.000.000	22 laporan	3.000.000	
3.27.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				-		-		-		-		20.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.213.227.827		20.158.884.366		21.149.091.714		22.188.548.163		23.272.673.937	Kasubbag Keuangan dan BMD
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pertanian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian	100%	100%	19.213.227.827	100%	20.158.884.366	100%	21.149.091.714	100%	22.188.548.163	100%	23.272.673.937	
3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.731.807.427		19.667.895.558		20.650.783.074		21.682.809.893		22.766.432.929	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 orang/bulan	128 orang/bulan	18.731.807.427	128 orang/bulan	19.667.895.558	128 orang/bulan	20.650.783.074	128 orang/bulan	21.682.809.893	128 orang/bulan	22.766.432.929	
3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				239.210.200		243.994.404		247.654.320		251.369.135		251.620.504	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	1 dokumen	239.210.200	1 dokumen	243.994.404	1 dokumen	247.654.320	1 dokumen	251.369.135	1 dokumen	251.620.504	
3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	500.000	2 laporan	500.000	2 laporan	500.000	2 laporan	500.000	2 laporan	500.000	
3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	500.000	4 laporan	500.000	4 laporan	500.000	4 laporan	500.000	4 laporan	500.000	
3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.500.000		100.500.000		170.500.000		100.500.000		100.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pertanian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pertanian	-	85,00 angka	100.500.000	86,00 angka	100.500.000	87,00 angka	170.500.000	88,00 angka	100.500.000	89,00 angka	100.500.000	
3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	12 dokumen	500.000	12 dokumen	500.000	12 dokumen	500.000	12 dokumen	500.000	12 dokumen	500.000	
3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		50.000.000		85.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	125 orang	50.000.000	125 orang	50.000.000	125 orang	85.000.000	125 orang	50.000.000	125 orang	50.000.000	
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				617.516.767		622.734.900		631.604.587		637.052.889		631.675.561	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian	100%	100%	617.516.767	100%	622.734.900	100%	631.604.587	100%	637.052.889	100%	631.675.561	
3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				175.143.227		178.646.092		185.791.935		189.507.774		187.612.696	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	175.143.227	12 paket	178.646.092	12 paket	185.791.935	12 paket	189.507.774	12 paket	187.612.696	
3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	15.000.000	4 paket	15.000.000	4 paket	15.000.000	4 paket	15.000.000	4 paket	15.000.000	
3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.660.000		9.660.000		9.660.000		9.660.000		9.660.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	9.660.000	12 dokumen	9.660.000	12 dokumen	9.660.000	12 dokumen	9.660.000	12 dokumen	9.660.000	
3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	
3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.838.000		86.267.190		86.698.526		87.132.019		86.260.698	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	85.838.000	12 laporan	86.267.190	12 laporan	86.698.526	12 laporan	87.132.019	12 laporan	86.260.698	
3.27.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				85.688.770		86.117.214		86.547.800		86.980.539		86.110.734	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 dokumen	3 dokumen	85.688.770	3 dokumen	86.117.214	3 dokumen	86.547.800	3 dokumen	86.980.539	3 dokumen	86.110.734	
3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				498.535.331		1.643.617.689		1.098.305.004		719.783.358		453.447.767	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	100%	100%	498.535.331	100%	1.643.617.689	100%	1.098.305.004	100%	719.783.358	100%	453.447.767	
3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				270.000.000		1.092.385.698		450.000.000		459.000.000		270.270.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	15 unit	270.000.000	5 unit	1.092.385.698	15 unit	450.000.000	4 unit	459.000.000	15 unit	270.270.000	
3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel				99.707.066		256.687.217		233.897.207		109.092.067		80.257.126	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 paket	172 paket	99.707.066	168 paket	256.687.217	24 paket	233.897.207	24 paket	109.092.067	24 paket	80.257.126	
3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.560.599		18.928.779		90.255.295		21.299.612		11.331.758	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	7 unit	14.560.599	8 unit	18.928.779	8 unit	90.255.295	8 unit	21.299.612	8 unit	11.331.758	
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.702.211.481		4.135.146.028		4.302.947.184		4.270.134.053		3.844.193.566	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	3.702.211.481	100%	4.135.146.028	100%	4.302.947.184	100%	4.270.134.053	100%	3.844.193.566	
3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000		432.000.000		466.560.000		471.225.600		475.937.856	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	400.000.000	12 laporan	432.000.000	12 laporan	466.560.000	12 laporan	471.225.600	12 laporan	475.937.856	
3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.651.105.740		1.851.573.014		1.918.193.592		1.899.454.226		1.684.127.855	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1.651.105.740	12 laporan	1.851.573.014	12 laporan	1.918.193.592	12 laporan	1.899.454.226	12 laporan	1.684.127.855	
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.411.098.476		2.207.754.733		3.361.710.659		2.157.166.872		1.798.557.481	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian sesuai ketentuan	100%	100%	1.411.098.476	100%	2.207.754.733	100%	3.361.710.659	100%	2.157.166.872	100%	1.798.557.481	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000		45.900.000		46.818.000		47.754.360		47.802.114	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	45.000.000	1 unit	45.900.000	1 unit	46.818.000	1 unit	47.754.360	1 unit	47.802.114	
3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				178.000.000		181.560.000		185.191.200		188.895.024		188.706.129	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 unit	41 unit	178.000.000	42 unit	181.560.000	42 unit	185.191.200	42 unit	188.895.024	57 unit	188.706.129	
3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.000.000		107.100.000		407.743.819		415.898.695		415.482.796	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 unit	140 unit	105.000.000	140 unit	107.100.000	140 unit	407.743.819	140 unit	415.898.695	140 unit	415.482.796	
3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.049.238		792.267.367		1.064.511.311		449.912.537		271.188.758	
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12 unit	7 unit	400.049.238	7 unit	792.267.367	7 unit	1.064.511.311	7 unit	449.912.537	7 unit	271.188.758	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

4.3.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai produksi pertanian	rupiah	171.723.064.900	171.728.951.000	172.161.573.050	172.594.078.323	173.030.581.521	173.461.738.959	Nilai ekonomi dari seluruh hasil pertanian yang dihasilkan dalam satu tahun (harga komoditas dikalikan dengan jumlah produksi dalam satu tahun)
2	Rata-rata produktivitas tanaman pangan	ton/ha	7,84	7,88	7,93	7,98	8,04	8,09	Jumlah hasil produksi (setara ton gkp) Padi, Jagung, Singkong dibagi dengan luas panen (dalam ha) Padi, Jagung, dan Singkong per tahun
3	Rata-rata produktivitas tanaman hortikultura	Kuintal /ha	17,25	17,39	17,53	17,66	17,80	17,94	Jumlah hasil produksi (dalam kwintal) Cabai, Bawang Merah, Tomat, Terong dibagi dengan luas panen (dalam ha) Cabai, Bawang Merah, Tomat, Terong per tahun
4	Rata-rata produktivitas hasil peternakan	kg/ekor	87,18	87,37	87,56	87,76	87,95	88,14	Rata-rata produktivitas telur, daging ayam, dan daging sapi (dalam kg per ekor)

4.4.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian
Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/tahun	6,93	7,04	7,15	7,26	7,37	7,48	jumlah produksi / luas tanam dalam satu tahun
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	-5	-5	-5	-5	-5	-5	(jumlah kasus PHMS tahun n - jumlah kasus PHMS tahun n-1) / jumlah kasus PHMS tahun n-1 x 100%
3	Produktivitas sentra unggulan pertanian	kawasan	7,00	8,00	9,00	9,00	10,00	11,00	jumlah kawasan sentra unggulan pertanian
4	Jumlah kawasan/kelurahan yang melaksanakan integrated urban farming di wilayahnya	kelurahan	48,00	64,00	80,00	96,00	112,00	128,00	jumlah kelurahan yang melakukan praktik pertanian dan peternakan dalam satu kawasan yang sama

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pertanian Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pilihan Bidang Pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian Kota Semarang.

Permasalahan sektor pertanian di Kota Semarang sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pertanian Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

26. DINAS PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Kota Semarang maka Dinas Perdagangan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang perdagangan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Perdagangan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Perdagangan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Perdagangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 115 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah membantu Walikota/Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Sub.koordinator Perencanaan dan Evaluasi
   2) Sub.bagian Keuangan dan Aset; dan

3) Sub.bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, terdiri atas:
   1) Sub Koordinator Ekspor dan Impor;
   2) Sub Koordinator Stabilisasi Harga Barang;
   3) Sub Koordinator Pengendalian Usaha
d. Bidang Bina Usaha, terdiri dari:
   1) Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
   2) Sub Koordinator Pendapatan;
   3) Sub Koordinator Pengaturan Pedagang Kreatif Lapangan.
e. Bidang Penataan dan Penetapan, terdiri atas :
   1) Sub Koordinator Pemetaan dan Penataan;
   2) Sub Koordinator Pengawasan Sarana Perdagangan;
   3) Sub Koordinator Penetapan.
f. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan, terdiri atas:
   1) Sub Koordinator Bangunan;
   2) Sub Koordinator Kebersihan Lingkungan;
   3) Sub Koordinator Pelayanan Air dan Kelistrikan.
g. UPTD Metrologi Legal;
h. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI DINAS

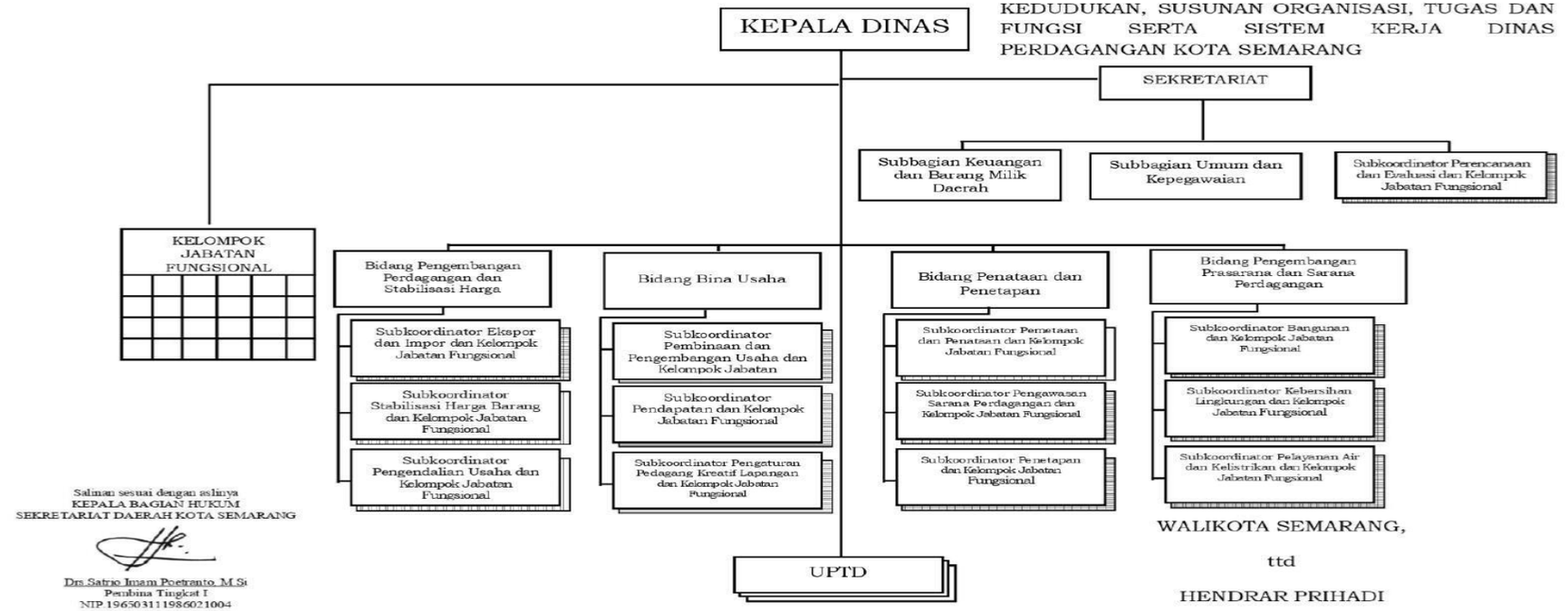

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan, uraian tugas jabatan struktural Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Perdagangan di klasifikasikan ke dalam gambar/ tabel. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	1	-	-	-	1
2	SMP Sederajat	7	-	-	-	7
3	SMA Sederajat	46	3	130	29	208
4	D3	4	8	2	1	15
5	S1	32	18	7	6	63
6	S2	7	1	-	-	8
7	S3	-	-	-	-	

Sumber : Dinas Perdagangan, 31 Agustus 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 302 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	25	7	32
3	Golongan III	67	21	88
4	Golongan IV	3	1	4

Sumber : Dinas Perdagangan, 31 Agustus 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perdagangan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Perdagangan

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengad	Letak/Alamat	Hak	Sertifikat		Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Pasar	4.630,00	1930	Jl. Teuku Umar Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik	Hak Pakai	27/07/2006	HP 8	Pasar Jatingaleh	PEMBELIAN	8.806.000,00	Bersetifikat -13.02.06.01
2	Tanah Bangunan Pasar	6.479,00	1949	Jl. MGR Sugiyopranoto No. 2 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Pasar Bulu	PEMBELIAN	29.695.600,00	belum sertifikat -13.02.04.01
3	Tanah Bangunan Pasar	1.575,00	1949	Jl. Kyai Saleh RT. 04 RW. 02 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai			Pasar Randusari	PEMBELIAN	2.667.500,00	belum bersetifikat - 13.02.04.03
4	Tanah Bangunan Pasar	15.000,00	1975	Jl. Pasar Pungkuran Kel. Kauman Kec. Semarang Tengah				Pasar Kanjengan	PEMBELIAN	18.600.000,00	Belum Sertifikat - 13.02.02.00
5	Tanah Bangunan Pasar	882,00	1975	Jl. Agus Salim Kel. Kauman Semarang Tengah				RTH Alun-alun Mesjid Agung (Eks. Pasar Yaik Permai	PEMBELIAN	35.280.000,00	Belum sertifikat -13.02.02.03
6	Tanah Bangunan Pasar	5.028,00	1975	Jl. Agus Salim Kel. Kauman Kec. Semarang Tengah				RTH Alun-alun Masjid Agung Eks. Pasar Yaik Baru	PEMBELIAN	20.110.000,00	Belum sertifikat -13.02.02.05
7	Tanah Bangunan Pasar	506,00	1976	Jl. Jangli Kel. Karanganyar Gunung Kec. Candisari	Hak Pakai	09/08/2005	HP 26	Pasar Jangli	PEMBELIAN	136.000,00	Bersertifikat -13.02.06.11
8	Tanah Bangunan Pasar	22.265,00	1977	Jl. Pengapon Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur	Hak Pakai	27/07/2007	HP 21	Pasar Rejomulyo	PEMBELIAN	30.367.890,00	Bersertifikat - 13.02.03.03

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengad	Letak/ Alamat	Hak	Sertifikat		Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
						Tanggal	Nomor				
9	Tanah Bangunan Pasar	284,00	1977	Jl. MT. Haryono Kel. Purwodinatan Kec. SemarangTengah	Hak Pakai			Pasar Bubakan	PEMBELIAN	5.680.000,00	belum sertifikat -13.02.03.06
10	Tanah Bangunan Pasar	3.009,00	1977	Jl. Sampangan Kel. SampanganKec. Gajah Mungkur	Hak Pakai	27/07/2006	HP 12	RTH Taman Sampangan	PEMBELIAN	4.592.550,00	bersetifikat -13.02.04.04
11	Tanah Bangunan Pasar	2.490,00	1977	Jl. Boom Lama Kel. KuninganKec. Semarang Utara	Hak Pakai	14/12/2007	HP 13	Pasar Boom Lama	PEMBELIAN	306.300,00	Bersetifikat - 13.02.04.05
12	Tanah Bangunan Pasar	2.694,00	1977	Jl. Surtikanti Raya Kel. Bulu LorKec. Semarang Utara	Hak Pakai	14/12/2007	HP 18	Pasar Surtikanti	PEMBELIAN	1.428.000,00	Bersetifikat - 13.02.04.06
13	Tanah Bangunan Pasar	567,00	1977	Jl. Peres Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara	Hak Pakai	21/12/2006	HP 22	Pasar Purwogondo	PEMBELIAN	442.000,00	Bersertifikat - 13.02.04.07
14	Tanah Bangunan Pasar	2.038,00	1977	Jl. WR. Supratman Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat	Hak Pakai	07/06/2007	HP 16	Pasar Simongan	PEMBELIAN	408.000,00	Bersetifikat -13.02.05.02
15	Tanah Bangunan Pasar	2.790,00	1977	Jl. Siliwangi Kel. PurwoyosoKec. Ngaliyan	Hak Pakai	07/06/2007	HP 10	Pasar Jrakah	PEMBELIAN	3.825.000,00	Bersertifikat - 13.02.05.04
16	Tanah Bangunan Pasar	2.220,00	1977	Jl. Raya Boja - Ngaliyan Kel. Ngadirgo Kec. Mijen	Hak Pakai	04/07/2007	HP 2	Pasar Mijen	PEMBELIAN	1.156.000,00	bersetifikat - 13.02.05.05
17	Tanah Bangunan Pasar	1.502,00	1977	Pasar Ngaliyan Kel. NgaliyanKec. Ngaliyan	Hak Pakai	03/04/2006	HP 16	Pasar Ngaliyan	PEMBELIAN	1.147.500,00	Bersetifikat - 13.02.05.06
18	Tanah Bangunan Pasar	3.424,00	1977	Jl. Raya Cangkiran Kel. GunungPati Kec. Gunungpati	Hak Pakai	14/12/2007	HP 27	Pasar Gunung Pati	PEMBELIAN	850.000,00	bersetifikat - 13.02.05.07

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengad	Letak/ Alamat	Hak	Sertifikat		Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
						Tanggal	Nomor				
19	Tanah Bangunan Pasar	3.048,00	1977	Jl. Mr. Sutan Syahrir Kel. GenukSari Kec. Genuk	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Pasar Genuk	PEMBELIAN	2.072.640,00	Belum sertifikat - 13.02.07.10
20	Tanah Bangunan Pasar	3.744,00	1978	Jl. Jendral Sudirman Kel.	Hak Pakai	07/06/2007	HP 12	Pasar Karangayu	PEMBELIAN	20.471.400,00	Bersetifikat -

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Perdagangan

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai(M2)	Letak/LokasiAlamat	Luas (M2)	StatusTanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
1	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	2230	Jl. Siliwangi Kel. Purwoyoso		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	7.679.232,06
2	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	1947	Jl. Majapahit Kel. Gayamsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.753.616,99
3	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	1512	Jl. Teuku Umar Kel. Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	5.281.112,64
4	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	476	Jl. Suryo Kusumo KelMuktiharjo Kidul		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	777.346,13
5	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	390	Jl. Erowati Raya Kel. Bulu Lor		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.538.561,52

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai(M2)	Letak/LokasiAlamat	Luas (M2)	StatusTanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
6	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	1146	Jl. Purwosari Kel. Rejosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.631.578,67
7	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	378	Jl. Raya Walisongo Kel.Wonosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	831.953,66
8	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	720	Jl. Kuningan Kel. Kuningan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.012.777,48
9	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	624	Jl. Boja Kel. Ngadirgo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.072.218,17
10	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	2001	Jl. Kyai Saleh Kel. Randusari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	5.402.521,39
11	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	8600	Jl. Sawah Besar Kel. SawahBesar		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	511.819,87
12	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	2287	Jl. Raya Cangkiran Kel.Gunungpati		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.098.229,71
13	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	672	Jl. Wolter Monginsidi Kel.Bangetayu Kulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	921.129,75
14	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	270	Jl. Udan Riris Kel. Tlogosarikulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	536.154,22

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai(M2)	Letak/LokasiAlamat	Luas (M2)	StatusTanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
15	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	168	Jl. Sisingamangaraja Kel. Candi (dulu Kel. Karanganyar gunung)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.314.528,36
16	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	96	Jl. Simongan Kel. NgemplakSimongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	247.038,16
17	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	1960	Jl. Tentara Pelajar Kel. LamperKidul		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	778.468,79
18	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	3960	Jl. Jendral Sudirman Kel.Karangayu		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	4.479.100,86
19	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	16	Jl. Purwosari Kel. Rejosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	53.201,01
20	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	440	Jl. Purwosari Kel. Rejosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	539.992,42
21	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	12	Jl. Purwosari Kel. Rejosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	48.899,76
22	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	40	Jl. Sawah Besar Kel. SawahBesar (dulu Kel. Kaligawe)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	32.000,00
23	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	324	Jl. Sumber Mas Kel. PanggungKidul		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	259.200,00
24	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya	Kurang	252	Jl. Sumber Mas Kel. PanggungKidul		Tanah Milik	PEMBELIAN	466.073,51

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai(M2)	Letak/LokasiAlamat	Luas (M2)	StatusTanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
	Permanen	Baik				Pemda		
25	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	54	Jl. Sumber Mas Kel. PanggungKidul		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	53.797,50
26	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	54	Jl. Sumber Mas Kel. PanggungKidul		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	43.200,00
27	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	180	Jl. Sumber Mas Kel. PanggungKidul		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	144.000,00
28	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	360	Jl. Kuningan Kel. Kuningan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	516.487,43
29	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	42	Jl. Kuningan Kel. Kuningan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	29.400,00
30	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	450	Jl. Jendral Sudirman Kel.Karangayu		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	740.063,64
31	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	180	Jl. Jendral Sudirman Kel.Karangayu		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	248.770,00
32	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	172	jl. jendral sudirman		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	157.218,00
33	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	9	Jl. Simongan Kel. NgemplakSimongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	6.300,00
34	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	108	Jl. Simongan Kel. NgemplakSimongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	213.862,78

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai(M2)	Letak/LokasiAlamat	Luas (M2)	StatusTanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
35	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	72	Jl. Simongan Kel. NgemplakSimongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	72.000,00
36	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	36	Jl. Simongan Kel. NgemplakSimongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	32.625,00
37	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	72	Jl. Simongan Kel. NgemplakSimongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	57.600,00

38	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	18	Jl. Abdul Rahman Saleh Kel.KembangArum		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	70.306,36
39	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	420	Jl. Abdul Rahman Saleh Kel.KembangArum		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	325.500,00
40	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	9	Jl. Abdul Rahman Saleh Kel.KembangArum		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	6.162,50
41	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	9	Jl. Abdul Rahman Saleh Kel.KembangArum		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	6.975,00
42	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	72	Jl. Raya Boja Kel. Ngadirgo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	79.221,01
43	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	552	Jl. Boja Kel. Ngadirgo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	490.329,09
44	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	24	Jl. Boja Kel. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	16.800,00
45	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	189	Jl. Boja Kel. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	362.806,00
46	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	92	Jl. Raya Boja Kel. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	106.650,00
47	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	240	Jl. Raya Boja Kel. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	168.000,00
48	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	744	Jl. Raya Cangkiran Kel.Gunungpati		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	802.772,15
49	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	12	Jl. Raya Cangkiran Kel.Gunungpati		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	8.400,00
50	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	25	Jl. Raya Cangkiran Kel.Gunungpati		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	24.250,00

51	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	378	Jl. Raya Cangkiran Kel.Gunungpati		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	312.525,00
52	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	98	Jl. Raya Walisongo Kel.Wonosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	68.600,00
53	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	98	Jl. Raya Walisongo Kel.Wonosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	68.600,00
54	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	45	Jl. Raya Walisongo Kel.Wonosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	33.750,00
55	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	119	Jl. Raya Walisongo Kel.Wonosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	299.061,55
56	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	400	Jl . Teuku Umar KelurahanTinjomoyo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	280.000,00
57	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	225	Jl. Teuku Umar KelurahanTinjomoyo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	180.000,00
58	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	12	Jl. Teuku Umar Kel. Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	18.000,00
59	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	525	Jl. Damar Kel. Padangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	792.272,86
60	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	582	Jl. Damar Kel. Podangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	465.600,00
62	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	706	Jl. Damar (Dulu Kel.Pedalangan)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.779.596,42
63	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	280	Jl. Damar (Dulu Kel.Pedalangan)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	196.000,00

64	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	113	Jl. Setia Budi Kel. Srondolkulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	131.829,27
65	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	54	Jl. Setia Budi Kel. SrondolKulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	282.239,22
66	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	113	Jl. Setia Budi Kel. SrondolKulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	310.705,23
67	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	336	Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	9.840,00
68	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	900	Jl. MT. Haryono Kel.Peterongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.219.240,07
69	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	168	Jl. MT. Haryono Kel.Peterongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	168.000,00
70	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	619	Jl. MT. Haryono Kel.Peterongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	649.687,50
71	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	36	Jl. MT. Haryono Kel.Peterongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	39.600,00
72	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	288	Jl. MT. Haryono Kel.Peterongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	432.000,00
73	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	927	Jl. MT. Haryono Kel.Peterongan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.571.674,29
74	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	60	Jl. S. Parman Kel. Wonotingal		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	118.700,00
75	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	60	Jl. S. Parman Kel. Wonotingal		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	21.600,00

76	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	60	Jl. S. Parman Kel. Wonotingal		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	59.557,50
77	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	60	Jl. S. Parman Kel. Wonotingal		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	297.848,47
78	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	60	Jl. S. Parman Kel. Wonotingal		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	9.600,00
79	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	60	Jl. S. Parman Kel. Wonotingal		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	12.000,00
80	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	25	Jl. Sisingamangaraja Kel. Candi (dulu Kel. Karanganyargunung)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	20.000,00
81	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	325	Jl. Jangli Kel. Jangli		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	534.337,49
82	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	62	Jl. Tentara Pelajar Kel. LamperKidul (dulu Kel. Jomblang)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	38.557,50
83	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	135	Jl. Tentara Pelajar Kel. LamperKidul (dulu Kel. Jomblang)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	119.000,00
84	Bangunan Gedung Tempat	Baik	135	Jl. Tentara Pelajar Kel. Lamper		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	108.000,00
85	Kerja Lainnya Permanen Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	630	Kidul (dulu Kel. Jomblang) Jl. Tentara Pelajar Kel. LamperKidul (dulu Kel. Jomblang)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	151.200,00
86	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	140	Jl. Tentara Pelajar Kel. LamperKidul (dulu Kel. Jomblang)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	109.500,00
87	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	92	Jl. Tentara Pelajar Kel. LamperKidul (dulu Kel. Jomblang)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	64.400,00

88	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	13	Jl. Tentara Pelajar Kel. LamperKidul (dulu Kel. Jomblang)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	10.000,00
89	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	506	Jl. Tentara Pelajar Kel. LamperKIdul		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	661.418,74
90	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	16	Jl. Supriyadi Kel. Kalicari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	12.460,00
91	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	216	Jl. Supriyadi Kel. Kalicari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	172.800,00
92	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	225	Jl. Satrio Wibowo Kel. TlogosariKulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	427.810,37
93	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	432	Jl. Satrio Wibowo Kel. TlogosariKulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	368.600,49
94	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	9	Jl. Satrio Wibowo Kel. TlogosariKulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	15.040,00
95	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	16	Jl. Satrio Wibowo Kel. TlogosariKulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	9.600,00
96	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	618	Jl. Suryo Kusumo KelMuktiharjo Kidul		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	370.800,00
97	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	30	Jl. Tentara Pelajar Kel. Sendangguwo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	10.500,00
98	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	12	Jl. Tentara Pelajar Kel. Sendangguwo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	7.200,00
99	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	225	Jl. Tentara Pelajar Kel. Kedungmundu (dulu kel.Sendangguwo)		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	430.563,92
100	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	687	Jl. Wolter Monginsidi Kel.Bangetayu Kulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	542.199,62

101	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	173	Jl. Wolter Monginsidi Kel.Bangetayu Kulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	156.357,89
102	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	23	Jl. Majapahit Kel. Gayamsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	58.709,78
103	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	248	Jl. Majapahit Kel. Gayamsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	170.000,00
104	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Rusak Berat				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	66.051,33
105	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Rusak Berat				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	630.615,26
106	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Rusak Berat				Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.324.491,74
107	Bangunan Gedung TempatIbadah Permanen	Baik	24	Jl. Dr. Cipto No 115 Semarangkantor Dinas Pasar		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	248.225,00
108	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	6	Jl. Dr. Cipto No. 115 SemarangKantor Dinas Pasar		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	660.160,00
109	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	28	Penggaron		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	103.305,04
111	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	1862	Kel. Bulu Lor Kec. SemarangUtara		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	980.773,00
112	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	54	Jl. Jendral Sudirman Kel.Karangayu		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	92.556,50
113	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	2604	Jl. Siliwangi Kel. PurwoyosoSemarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.645.708,42
111	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	1862	Kel. Bulu Lor Kec. SemarangUtara		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	980.773,00

112	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	54	Jl. Jendral Sudirman Kel.Karangayu		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	92.556,50
113	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	2604	Jl. Siliwangi Kel. PurwoyosoSemarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.645.708,42
114	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	145	Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	43.971,20
115	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	190	RPU Penggaron, KelurahanPenggaron Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	553.474,00
116	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	453	Jl. Tengku Umar, KelurahanTinjomoyo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	91.289,00
117	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	562	Jl. Wolter Monginsidi Kel.Bangetahu Kulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	98.725,00
118	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	207	Jl. Raya Cangkiran KelurahanGunungpati Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	99.532,00
119	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	15	Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	4.602,00
120	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	6704	RPU Penggaron kel. Penggaron kec. Pedurungan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.601.322,00
121	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	96	RPU Penggaron		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	12.346.796,97

122	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	1728	Jl. Menoreh Raya Kel.Sampangan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	12.936.522,85
123	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	12	Jl. Simongan Raya Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	46.116,06
124	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	96	Jl. Purwosari Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	156.558,13
125	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	156	Jl. Teuku Umuar Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	153.168,40
126	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	630	Jl. Alun-alun Johar Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	219.871,15
127	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	264	Jl. Wolter Monginsidi Kel.BangetayuKulon smg		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	309.062,77
128	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	968.75	Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kel.SemarangBarat		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.084.500,35
129	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	48	Jl. Teuku Umar, Kel. Jatingaleh		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	47.440,00
130	Bangunan Gedung KantorSemi Permanen	Baik	210	Jl. Pandanaran II Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	259.796,88
131	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	22.86	Simpang Lima sisi luar DepanKantorTelkom & SMK 7		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	174.252,32
132	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	22.86	Simpang Lima sisi luar DepanMatahariSemarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	180.680,59
133	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	22.86	Selter Taman Menteri Supeno,Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	652.138,21

134	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	1473	Pedestrian Taman MenteriSupeno,Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	470.237,31
135	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	22.86	Simpang Lima Sisi LuarSamping Ac- Hardware Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	172.958,12
136	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	22.86	Simpang Lima sisi luar Depan Pertokoan E-Plasa		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	384.720,06
137	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	22.86	Simpang Lima sisi luar, Depan Super Ekomomi		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	407.085,73
138	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	56	Jl. Dr. Cipto Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	264.214,36
139	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	150	Jl. Kartini Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.393.072,63
140	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	1862	Jl. Banjir kanal Barat		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.501.278,00
141	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	860	Jl. Menoreh Raya, Kel.Sampangan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.320.895,10
142	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	328.8	Semarang Jl. Tambra, Kelurahan Purwosari Kec. Semarang Utara		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.683.628,21
143	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	1700	Jl. Rasamala, Pedalangan.Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	10.282.724,23
144	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik		Jl. RPU Penggaron Semarang			Pembelian	26.861.246,32
145	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	2342	Jl. Raya Pasar Genuk Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.636.346,68

146	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	1370	Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	177.084,00
147	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	5070	Jl. Mgr. Soegijopranoto,Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	54.153.642,39
148	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	96	Jl. Kembang Arum SemarangBarat		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	198.900,00
149	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Darurat	Baik	330	Jl. Raya Pasar Genuk Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	30.104,85
150	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	3406.65	Jl. Tugu Raya RT.02 RW. 09KelurahanMeteseh		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.693.101,51
151	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	4743	Jl. Watu Kaji KelurahanGedawang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.292.852,71
152	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	4000.95	Jl. Ratan Cilik KelurahanBanjardowo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.986.041,86
153	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	128	Jl. Tentara Pelajar, Kel. KedungMundu Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	212.375,60
154	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	52	Jl. RPU Penggaron Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	685.596,53
155	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	4722.2	Jl. Tlogosari Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.461.197,02
156	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	450	Jl. Mgr Soegijo PranotoSemarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	627.957,52
157	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	160	Jl. Empu Tantular Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	186.530,53

158	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	35	Jl. Kuningan Semarang Utara		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	100.867,83
159	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	150	Jl. Fatmawati Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	210.409,01
160	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	2592	Jl. Pengapon RejomulyoSemarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	33.771.204,28
161	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	180	Jl. Dr. Cipto Kembon AgungSemarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	165.930,85
162	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	42	Jl. Raya Genuk Kel. Genuk Sari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	201.366,44
163	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	66000	Jl. Soekarno Hata KomplekMAJTSemarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	31.785.516,87
164	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	142	Kelurahan Bulu Lor		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	146.401,70
164	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	296	Jl. Fatmawati Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	406.931,42
165	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	85	Taman Suryokusumo, Kelurahan TlogosariSemarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	177.423,62
166	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	900	Jl. Taman Suryokusumo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.219.995,91
167	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	2725	Jl. MT. Haryono Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	29.937.121,02

168	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	2592	Jl. Fatmawati Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	19.017.162,31
169	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	450	Jl. Sawah Besar Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.347.687,79
170	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	4500	Jl. Dr. Cipto Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.001.771,12
171	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	490	Jl. Tambra KelurahanPurwosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.751.090,56
172	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Permanen	Baik	945.19	Jl. Gatot Subroto, KelurahanPurwoyoso		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	516.396,05
173	Bangunan Gedung KantorPermanen	Baik	3858	Jl. Taman SuryokusumoSemarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.826.178,37
174	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	84	Jl. Lempongsari Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	213.457,22
175	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	95	Jl. Pekunden Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	213.892,16
176	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Baik	336	Jl. Sawah Besar Kel. KaligaweSemarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	734.079,09
177	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	3940	Jl. RPU Penggaron Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.595.042,71
178	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	7550	Jl. RPU Penggaron Semarang			Pembelian	13.698.948,23
179	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Baik	1760	Jl. Potrosari Kel. SrondolSemarang			Pembelian	10.749.581,76
180	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	530	Jalan Dr. Soetomo - PasarKembang Kalisari			Pembelian	3.976.541,30

181	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	3900	Jl. Sawah Besar			Pembelian	16.142.154,50
182	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	25000	Jl. Soekerno Hatta KawasanMAJTSemarang			Pembelian	15.804.583,86
183	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	1564	Jalan Kartini Semarang			Pembelian	1.215.308,48
184	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	1657.8	Jl. Majapahit Semarang			Pembelian	1.475.543,17
185	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	210.33	Kelurahan Cepoko Kec.Gunungpati			Pembelian	638.690,51
186	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	268	Jl. Tentara Pelajar KedungmunduSemarang			Pembelian	1.289.618,74
187	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	1985.76	JL. RPU Penggaron Semarang			Pembelian	4.520.769,50
188	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	459	Kelurahan Cepoko Kec.Gunungpati			Pembelian	2.602.635,48
189	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	435.625	Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang			Pembelian	3.274.869,08
190	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	5121	Jl. Wonodri Raya Semarang			Pembelian	19.038.626,06
191	Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermanen	Baik	1324.5	Jl. Srinindito Selatan RT. 01/01 KelurahanNgemplak SimonganSemarang Barat			Hibah	16.481.488,14

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Perdagangan.

a. Capaian Kinerja Dinas Perdagangan

Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Perdagangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Kota Semarang 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PDRB Sub Sektor Perdagangan	Juta rupiah			25.186.156	26.949.287	38.83.630	30.854.124	33.013.913	25.186.156	26.949.187	28.835.630	30.854.124	33.013.913	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas	US$			3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Penngkatan Kualitas Sarana Prasarana Perdagangan	%			38	38	40	42	44	38	38	40	42	44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%			4,11	4,09	4,06	4,0	3,8	4,11	4,09	4,06	4,0	3,8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Prosentase alat UTTP bertera	%			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
		13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
3	Satuan kinerja	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perdagangan

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perdagangan. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perdagangan. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Perdagangan.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pilihan Perdagangan	44,862,787,000	68,006,768,244	68,167,863,461	69,214,615,983	60,298,990,424	41,402,469,398	62,311,697,118	62,130,433,931	60,341,750,531	56,550,268,702	92%	92%	91%	87%	94%	0.10	0.10
Dinas Perdagangan	44,862,787,000	68,006,768,244	68,167,863,461	69,214,615,983	60,298,990,424	41,402,469,398	62,311,697,118	62,130,433,931	60,341,750,531	56,550,268,702	92%	92%	91%	87%	94%	0.10	0.10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,751,253,000					8,594,196,752					98%					-1.00	-1.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,127,613,000					5,973,232,619					97%					-1.00	-1.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	347,987,000					347,986,000					100 %					-1.00	-1.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	57,771,000					57,760,500					100 %					-1.00	-1.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	964,110,000					961,485,050					100 %					-1.00	-1.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0					0										#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Pelalatan dan Perlengkapan Kantor	51,359,000					51,324,000					100 %					-1.00	-1.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	265,525,000					265,520,700					100 %					-1.00	-1.00

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	351,852,000					351,851,883					100 %					-1.00	-1.00
Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	16,305,000					16,305,000					100 %					-1.00	-1.00
Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	568,731,000					568,731,000					100 %					-1.00	-1.00
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,103,760,000					1,103,195,000					100 %					-1.00	-1.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	144,170,000					144,170,000					100 %					-1.00	-1.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	289,783,000					289,722,300					100 %					-1.00	-1.00
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	388,063,000					388,063,000					100 %					-1.00	-1.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	137,731,000					137,729,000					100 %					-1.00	-1.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	90,654,000					90,152,550					99%					-1.00	-1.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	36,082,000					36,081,200					100 %					-1.00	-1.00

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	17,277,000					17,276,950					100 %					-1.00	-1.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	142,832,000					142,824,150					100 %					-1.00	-1.00
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	123,980,000					123,980,000					100 %					-1.00	-1.00
Penyusunan LKPJ SKPD	3,423,000					3,423,000					100 %					-1.00	-1.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,580,000					5,580,000					100 %					-1.00	-1.00
Penyusunan LKJIP	5,001,000					4,998,300					100 %					-1.00	-1.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,848,000					4,842,850					100 %					-1.00	-1.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	0					0					#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	0					0					#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Renja SKPD	0					0					#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan	0					0					#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	0					0					#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	337,783,000					337,783,000					100 %					-1.00	-1.00
Pengembangan Kemetrologian Di Daerah	50,625,000					50,625,000					100 %					-1.00	-1.00
Pengembangan Sarana Pelayanan Tera dan Tera Ulang Serta Pengawasan Kemetrologian	287,158,000					287,158,000					100 %					-1.00	-1.00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	107,080,000					107,080,000					100 %					-1.00	-1.00
Pengembangan Kluster Produk Ekspor	107,080,000					107,080,000					100 %					-1.00	-1.00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	32,425,724,000					29,124,842,196					90%					-1.00	-1.00
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	67,177,000					53,927,000					80%					-1.00	-1.00

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	93,845,000					93,845,000					100 %					-1.00	-1.00
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2,460,000					2,455,000					100 %					-1.00	-1.00
Perbaikan Pasar - Pasar	2,096,018,000					2,095,782,413					100 %					-1.00	-1.00
Pembangunan Pasar Tradisional	23,207,070,000					19,988,606,482					86%					-1.00	-1.00
Operasional Keamanan dan Ketertiban Pasar - Pasar	932,264,000					932,264,000					100 %					-1.00	-1.00
Updating Data Pasar dan Pedagang Pasar Kota Semarang	80,564,000					80,564,000					100 %					-1.00	-1.00
Penataan Pasar - Pasar	79,403,000					79,402,500					100 %					-1.00	-1.00
Optimalisasi Peningkatan PAD	118,470,000					118,469,750					100 %					-1.00	-1.00
Perbaikan Listrik Pasar - Pasar	675,257,000					675,256,600					100 %					-1.00	-1.00
Pembinaan Pedagang	33,917,000					33,917,000					100 %					-1.00	-1.00
Monitoring Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar	4,802,884,000					4,745,630,850					99%					-1.00	-1.00
Penyusunan Perencanaan dan Kajian Pasar - Pasar	55,703,000					55,703,000					100 %					-1.00	-1.00

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penghitungan Potensi Pasar - Pasar	2,495,000					2,495,000					100 %					-1.00	-1.00
Desiminasi Kebijakan Standarisasi Bidang Perdagangan	34,863,000					33,622,000					96%					-1.00	-1.00
Penguatan Jaringan Usaha dan Jasa Perdagangan Besar	42,415,000					31,990,000					75%					-1.00	-1.00
Lomba K3 Pasar Tradisional dan PKL	0					0					#DIV /0!					#DIV/0!	#DIV/0!
Registrasi Pedagang Pasca Penataan Pasar	2,307,000					2,307,000					100 %					-1.00	-1.00
Pemeliharaan Pasar - Pasar Kota Semarang	38,729,000					38,721,601					100 %					-1.00	-1.00
Pembangunan Pasar Tradisional (non APBD)	59,883,000					59,883,000					100 %					-1.00	-1.00
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	1,994,355,000					1,992,548,300					100 %					-1.00	-1.00
Penataan Tempat Berusaha bagi PKL dan Asongan	464,680,000					464,680,000					100 %					-1.00	-1.00
Monitoring PKL	1,487,209,000					1,487,209,000					100 %					-1.00	-1.00
Penataan PKL Dugderan	0					0										#DIV/0!	#DIV/0!

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan	42,466,000					40,659,300					96%					-1.00	-1.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		42,610,228,105	36,886,956,693	33,257,988,998	34,138,035,886		38,782,240,740	33,373,619,892	31,242,062,817	31,944,319,051		91%	90%	94%	94%	-0.07	-0.06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19,330,190	6,984,563	5,010,680			14,138,750	6,926,000	5,003,075			73%	99%	100%		-0.64	-0.60
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	987,423	1,879,440			0	982,400	1,876,775				99%	100%		-0.05	-0.04
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		7,622,076	3,006,340	1,789,280			4,063,500	2,988,000	1,787,000			53%	99%	100%		-0.67	-0.56
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11,708,114	2,990,800	1,341,960			10,075,250	2,955,600	1,339,300			86%	99%	100%		-0.77	-0.75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31,095,042,782	25,898,748,447	22,497,422,718	22,366,708,800		29,154,581,071	25,147,490,107	21,302,642,438	21,767,977,180		94%	97%	95%	97%	-0.10	-0.09
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		30,607,391,744	25,551,138,939	22,140,253,278	21,980,898,000		28,820,954,321	24,801,288,807	20,955,682,838	21,419,857,180		94%	97%	95%	97%	-0.10	-0.09
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		483,840,000	344,610,000	354,840,000	382,440,000		329,960,000	343,210,000	344,640,000	347,220,000		68%	100%	97%	91%	-0.06	0.02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3,811,038	999,836	776,480								0%	0%	0%		-0.65	#DIV/0!

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	999,836	776,480	1,685,400		0	996,000	773,200	450,000			100 %	100 %	27%	0.47	-0.32
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	999,836	776,480	1,685,400		0	997,100	773,200	450,000			100 %	100 %	27%	0.47	-0.32
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,854,653,958	1,236,230,450	1,217,372,870	1,647,251,694		1,662,666,329	1,181,204,327	1,129,270,165	1,486,239,833		90%	96%	93%	90%	0.00	-0.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5,213,200	10,000,000	15,000,000	10,000,000		2,118,000	10,000,000	15,000,000	4,350,000		41%	100 %	100 %	44%	0.36	1.17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		427,535,130	99,933,615		107,251,694		416,033,500	98,500,000		99,575,000		97%	99%		93%	-0.88	-0.88
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		27,108,191	30,000,000	30,000,000	30,000,000		22,792,500	22,833,000	27,783,500	10,922,100		84%	76%	93%	36%	0.04	-0.13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		159,737,825	165,000,000	182,919,474	200,000,000		145,581,786	158,872,973	181,593,513	166,575,000		91%	96%	99%	83%	0.08	0.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		696,829,492	182,749,754	449,580,000	750,000,000		578,735,960	182,737,400	443,169,600	715,938,300		83%	100 %	99%	95%	0.46	0.45
Fasilitasi Kunjungan Tamu		50,400,000	230,600,000	212,000,000	150,000,000		32,103,650	224,049,627	146,474,955	115,079,416		64%	97%	69%	77%	1.07	1.81

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		136,847,000	197,838,538	327,873,396	400,000,000		118,172,933	194,781,327	315,248,597	373,800,017		86%	98%	96%	93%	0.44	0.48
Dukungan Pelaksanaan SPBE			320,108,543					289,430,000								-1.00	-1.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		350,983,120					347,128,000					99%				-1.00	-1.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40,034,630	26,414,719	630,775,578	900,447,806		39,700,000	19,053,000	532,168,000	325,625,000		99%	72%	84%	36%	7.66	8.67
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		40,034,360	26,414,719	630,775,578	900,447,806		39,700,000	19,053,000	532,168,000	325,625,000		99%	72%	84%	36%	7.66	8.67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8,298,985,697	8,404,599,002	6,524,180,122	7,029,554,106		6,887,926,595	5,930,103,290	6,072,042,738	6,455,483,710		83%	71%	93%	92%	-0.04	-0.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7,350,591,352	7,304,650,202	5,423,583,322	5,960,077,106		5,959,824,267	4,856,766,612	4,977,460,014	5,388,041,722		81%	66%	92%	90%	-0.05	-0.03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		948,394,345	1,099,948,800	1,100,596,800	1,069,477,000		928,102,328	1,073,336,678	1,094,582,724	1,067,441,988		98%	98%	99%	100 %	0.04	0.05
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,302,181,118	1,313,979,512	2,383,227,030	2,134,215,380		1,023,227,995	1,088,843,168	2,200,936,401	1,908,993,328		79%	83%	92%	89%	0.24	0.32

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		720,480,000	720,479,672	623,272,430	529,610,000		488,284,395	507,396,034	513,154,840	476,397,445		68%	70%	82%	90%	-0.10	-0.01
Pemeliharaan Mebel		16,240,000	16,000,000	14,544,000	20,000,000		16,100,000	16,000,000	14,500,000	19,500,000		99%	100 %	100 %	98%	0.09	0.08
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		333,444,118	346,849,840	443,388,600	325,875,380		288,154,600	337,194,134	429,997,875	324,999,050		86%	97%	97%	100 %	0.02	0.07
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		232,017,000	230,650,000	1,302,022,000	1,258,730,000		230,689,000	228,253,000	1,243,283,686	1,088,096,833		99%	99%	95%	86%	1.54	1.44
Program PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		246,399,135	235,000,000	185,470,000	147,230,000		240,392,871	226,827,540	160,855,255	131,628,089		98%	97%	87%	89%	-0.15	-0.18
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		246,399,135	235,000,000	185,470,000	147,230,000		240,392,871	226,827,540	160,855,255	131,628,089		98%	97%	87%	89%	-0.15	-0.18

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		246,399,135	235,000,000	185,470,000	147,230,000		240,392,871	226,827,540	160,855,255	131,628,089		98%	97%	87%	89%	-0.15	-0.18
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		22,539,356,391	27,191,818,630	25,031,101,885	22,280,929,196		21,037,349,141	24,943,870,084	23,629,480,468	21,688,196,114		93%	92%	94%	97%	0.01	0.02
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		16,335,294,803	19,830,558,600	18,303,972,157	15,260,489,646		15,349,464,062	17,869,822,623	17,120,958,945	15,029,196,524		94%	90%	94%	98%	-0.01	0.00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		8,426,996,254	11,043,958,600	9,532,518,357	5,249,939,025		7,967,890,008	9,496,976,355	8,452,168,576	5,112,042,208		95%	86%	89%	97%	-0.09	-0.10
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		7,908,298,549	8,786,600,000	8,771,453,800	10,010,550,621		7,381,574,054	8,372,846,268	8,668,790,369	9,917,154,316		93%	95%	99%	99%	0.08	0.10
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		6,204,061,588	7,361,260,030	6,727,129,728	7,020,439,550		5,687,885,079	7,074,047,461	6,508,521,523	6,658,999,590		92%	96%	97%	95%	0.05	0.06

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		3,229,715,245	4,256,842,890	3,951,728,082	4,212,654,760		2,837,243,048	4,105,183,733	3,797,108,718	4,013,315,533		88%	96%	96%	95%	0.10	0.14
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2,974,346,343	3,104,417,140	2,775,401,646	2,807,784,790		2,850,642,031	2,968,863,728	2,711,412,805	2,645,684,057		96%	96%	98%	94%	-0.02	-0.02
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		187,129,641	427,535,948	8,043,000,000	345,260,864		156,292,026	380,891,470	2,814,976,363	289,325,699		84%	89%	35%	84%	6.05	2.31
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		130,193,777	277,535,948				109,850,809	236,194,450				84%	85%			0.07	0.08
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		130,193,777	277,535,948				109,850,809	236,194,450				84%	85%			0.07	0.08
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		56,935,864	150,000,000	8,043,000,000	345,260,864		46,441,217	144,697,020	2,814,976,363	289,325,699		82%	96%	35%	84%	17.77	6.56

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		56,935,864	150,000,000	8,043,000,000	345,260,864		46,441,217	144,697,020	2,814,976,363	289,325,699		82%	96%	35%	84%	17.77	6.56
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		1,003,993,237	935,000,000	729,327,000	1,038,741,976		815,767,569	887,120,360	666,000,416	367,624,711		81%	95%	91%	35%	0.05	-0.20
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1,003,993,237	935,000,000	729,327,000	1,038,741,976		815,767,569	887,120,360	666,000,416	367,624,711		81%	95%	91%	35%	0.05	-0.20
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		133,999,727	115,480,000	36,562,000	450,000,000		130,689,580	102,177,500	34,897,400	90,702,461		98%	88%	95%	20%	3.50	0.24
Pameran Dagang Nasional		869,993,510	819,520,000	692,765,000	588,741,976		685,077,989	784,942,860	631,103,016	276,922,250		79%	96%	91%	47%	-0.12	-0.20
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		988,336,640	1,156,638,000	1,179,245,900	1,134,082,802		873,842,368	1,037,226,131	1,097,405,059	1,091,071,429		88%	90%	93%	96%	0.05	0.08

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		988,336,640	1,156,638,000	1,179,245,900	1,134,082,802		873,842,368	1,037,226,131	1,097,405,059	1,091,071,429		88%	90%	93%	96%	0.05	0.08
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		579,722,208	644,322,000	523,296,100	544,926,640		489,207,600	541,079,038	472,990,684	515,088,743		84%	84%	90%	95%	-0.01	0.02
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		408,614,432	512,316,000	655,949,800	589,156,162		384,634,768	496,147,093	624,414,375	575,982,686		94%	97%	95%	98%	0.14	0.16
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		431,325,095	1,334,914,190	788,482,200	1,214,709,700		405,812,403	1,280,878,454	730,970,153	1,038,103,609		94%	96%	93%	85%	0.74	0.72
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		431,325,095	1,334,914,190	788,482,200	1,214,709,700		405,812,403	1,280,878,454	730,970,153	1,038,103,609		94%	96%	93%	85%	0.74	0.72
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		260,795,093	385,419,220	530,000,000	556,546,700		240,273,500	378,242,000	501,360,001	490,967,988		92%	98%	95%	88%	0.30	0.29
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		73,600,000	743,470,850	258,482,200	658,163,000		71,572,903	713,555,454	229,610,152	547,135,621		97%	96%	89%	83%	3.33	3.22

Program/	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		96,930,002	206,024,120				93,966,000	189,081,000				97%	92%			0.06	0.01

Keterangan:

1	Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
3	Anggaran tahun kedua renstra disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
4	Anggaran tahun ketiga renstra disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
5	Anggaran tahun keempat renstra disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
6	Anggaran tahun elima renstra disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keternagan 2-6
7	Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keternagan 7 -11
8	Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun		
9	Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun		
11	Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Perdagangan sebagai berikut:

1. Di era perdagangan bebas sekarang ini (MEA), para pengusaha/IKM dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas serta inovasi-inovasi produk agar bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain;
2. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu desain dan merk dagang;
3. Keterbatasan bahan baku produksi serta ketergantungan pada bahan baku impor yang akan menyebabkan hasil suatu produk harganya akan menjadi tinggi/mahal;
4. Masih rendahnya penguasaan tentang internet bagi sebagian besar ikm untuk melakukan pemasaran secara on line.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Perdagangan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Dengan era MEA sekarang ini, pasar tujuan ekspor semakin terbuka dan bertambah;
2. Berkembangnya sistem pemasaran secara online dapat mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi pemasaran bagi pengusaha;
3. Tersediannya pelabuhan laut dan bandar udara di Kota Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya;
4. Banyaknya event pameran lokal/nasional yang diikuti oleh IKM Kota Semarang yang difasilitasi oleh pemerintah daerah diharapkan akan dapat lebih membantu IKM dari sisi promosi;
5. Sudah terbentuknya kluster dan sentra industri di Kota Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku industri/ikm untuk mengembangkan serta jmelakukan inovasi produknya.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Perdagangan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perdagangan telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perdagangan.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 115 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perdagangan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Perdagangan yaitu: “Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pengelolaan sistem distribusi perdagangan	Pemanfaatan sarana prasarana perdagangan yang belum optimal
		Masih rendahnya ekspor produk lokal
		Lemahnya perlindungan konsumen

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Perdagangan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perdagangan
2. masih rendahnya produk ekspor lokal
3. kurang optimalnya perlindungan konsumen

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang sesuai dengan lingkunp perangkat Daerah.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang perdagangan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan potensi sumber daya lokal dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital.

Dinas perdagangan secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator mewujudkan perekonomian inklusif.

c. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Pra Ranwal Renstra Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2026-2030. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut: Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah yaitu: "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2026-2030 adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, dengan indikator:
   - Pertumbuhan ekspor non migas
   - Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor
   - Pertumbuhan ekspor jasa
2. Peningkatan pengamanan perdagangan, dengan indikator:
   - % penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor
   - % pengamanan kebijakan nasional di forum internasional
   - % pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional, dengan indikator:
   - Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor
   - Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding, dengan indikator:
   - Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding)
   - Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa, dengan indikator:
   - Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator:
   - Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan
   - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistk nasional
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN), dengan indikator:
   - Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang, dengan indikator:

- Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
- Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
- Pertumbuhan nilai transaksi di pasar lelang

9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator:
   - Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah
   - Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
   - Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan
10. Peningkatan perlindungan konsumen, dengan indikator:
   - Indeks Keberdayaan Konsumen
   - % barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku
   - % barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan
   - % alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, dengan indikator:
   - Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
   - % Kota yang dapat menerbitkan SIUP TDP maksimal 3 (tiga) hari
12. Peningkanan kualitas kinerja organisasi, dengan indikator:
   - Meningkatnya dukungan kerja layanan publik
   - Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan
   - Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
   - Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan, dengan indikator:
   - Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian, dengan indikator:
   - % hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan
   - % rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan di atas, tujuan dan beserta indikator yang bisa ditetapkan di Dinas Perdagangan antara lain:

- Peningkatan pengamanan perdagangan
- Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri
- Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
- Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha

d. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah dan meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Kawasan perdagangan dan jasa dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial beserta fasilitas pendukungnya. Termasuk di dalamnya terdapat juga sektor informal yang dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima yaitu pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, terdapat pengaturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kawasan/ ruang pamer;
c. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pusat grosir;
d. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan kantor dan jasa;
e. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan hotel dan jasa hiburan;
f. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan industri kreatif;
g. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya;
h. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jasa pendidikan tinggi swasta;
i. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk sektor informal;
j. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk gudang
k. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);

Dalam Peraturan Daerah tersebut juga disebutkan bahwa kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional, nasional maupun internasional diarahkan di Kawasan Peterongan - Tawang - Siliwangi, sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan sub pusat pelayanan kota direncanakan tersebar di setiap bagian wilayah kota, serta setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya. Indikasi program dalam rencana tata ruang wilayah Kota Semarang yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Rencana pengaturan kegiatan sektor informal
   a. Pedagang tumbuhan dan bunga di Kelurahan Sodong (Kecamatan Mijen)

b. Penjualan produk kerajinan di Pasar Waru (Kecamatan Gayamsari)
c. Pedagang kaki lima makanan, jajanan, dan komoditas lainnya (Simpang Lima dan Pecinan Semawis)

2. Kawasan perdagangan dan jasa
   a. Pengembangan kegiatan Pasar Agro di Masjid Agung Jawa Tengah (Kecamatan Gayamsari)
   b. Peningkatan kualitas Pasar Johar (Kecamatan Semarang Tengah)
   c. Pembangunan Underground Simpang Lima (Kecamatan Semarang Tengah)
   d. Peningkatan kualitas pasar skala pelayanan kota dan atau wilayah (Pasar Bulu di Kecamatan Semarang Tengah, Pasar Peterongan di Kecamatan Semarang Selatan, Pasar Rejomulyo, Pasar Dargo, Pasar Karimata di Kecamatan Semarang Timur, Pasar Karangayu di Kecamatan Semarang Barat, Pasar Mangkang di Kecamatan Ngaliyan, Pasar Satriyo Wibowo, Rumah Potong Unggas Penggaron di Kecamatan Pedurungan)
   e. Peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan lingkungan yang tersebar di seluruh Kecamatan
   f. Pengembangan kawasan pusat perbelanjaan berkualitas internasional di Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi
   g. Pengembangan pusat perbelanjaan supermarket di setiap bagian wilayah kota
   h. Pengembangan ritel modern di kawasan pusat pelayanan lingkungan di seluruh wilayah kota
   i. Pengembangan kawasan pertokoan disepanjang jalan utama sesuai dengan rencana pola ruang di seluruh wilayah kota

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Perdagangan. Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Dinas Perdagangan mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Tema Isu KLHS terhadap Dinas Perdagangan Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	1. Kondisi pengolahan sampah di Kota Semarang belum optimal
	2. Masih kurangnya dukungan ekonomi hijau
	3. Masih kurangnya dukungan prasarana sanitasi dan limbah yang mendukung keberlanjutan lingkungan

Tabel 2.9.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 Dinas Perdagangan Kota Semarang

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
	NIHIL								

g. Telaahan Dokumen Lainnya (Isu Strategis Nasional)

Terkait isu Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Perdagangan berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan mempertimbangkan kesetaraan gender agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara :

- ✓ Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, seperti pelatihan pemasaran, akses pasar ekspor, promosi produk UMKM
- ✓ Mengembangkan program dan kebijakan perdagangan yang responsif gender dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan misalnya dengan menyediakan ruang laktasi di pasar toilet khusus disabilitas
- ✓ Pengumpulan dan analisis data pilah menurut jenis kelamin misalnya pada data pelaku usaha laki-laki dibandingkan perempuan, akses terhadap pelatihan atau akses terhadap pasar

Selain isu terkait PUG diatas, Dinas Perdagangan juga mempunyai peran strategis dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak terutama di sektor perdagangan, ekonomi, dan layanan publik yang menjadi tanggungjawab Dinas Perdagangan dalam mendukung Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak (KLA) diantaranya :

- ✓ Pengawasan anak dalam aktivitas perdagangan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak ada pekerja anak di pasar
- ✓ Pengelolaan pasar yang ramah anak dengan menyediakan fasilitas publik seperti ruang menyusui (laktasi), toilet ramah anak, dan area aman dari bahaya
- ✓ Edukasi dan sosialisasi kepada pedagang dengan memberikan penyuluhan kepada pedagang agar tidak mempekerjakan anak atau menjual produk berbahaya bagi anak
- ✓ Melindungi anak dari barang berbahaya dengan melakukan pengawasan barang beredar di pasar dan toko modern

Disamping itu, Dinas Perdagangan juga ikut berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi khususnya sektor perdagangan melalui beberapa strategi berikut :

- ✓ Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kegiatan ekonomi dengan memberikan peluang usaha dan fasilitasi pemasaran
- ✓ Mengembangkan kebijakan perdagangan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil seperti revitalisasi pasar tradisional dan keringanan tarif retribusi
- ✓ Memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat miskin melalui operasi pasar bekerjasama dengan BUMN/BUMD, serta pengawasan distribusi barang tertentu seperti LPG bersubsidi

Tidak kalah penting dari ketiga isu sebelumnya, Dinas Perdagangan turut mengambil bagian dalam percepatan penurunan stunting, sebagai bagian dari peran strategis perangkat daerah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bergizi yang menjadi faktor penting dalam pencegahan stunting. Beberapa langkah yang perlu dilakukan :

- ✓ Mengendalikan harga dan pasokan bahan pangan pokok dan bergizi agar keluarga miskin tetap mampu membeli makanan bergizi bagi ibu hamil, balita, dan anak
- ✓ Mengawasi peredaran bahan pangan yang tidak layak konsumsi atau berbahaya dengan melakukan pengawasan mutu makanan di pasar
- ✓ Mendukung program pangan murah (sembako murah) bekerjasama dengan BUMN/BUMD yang menjangkau keluarga rawan stunting

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra, Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Isu Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya pelabuhan laut dan bandar udara di Kota Semarang yang memudahkan kegiatan usaha. Pasar tujuan ekspor semakin	Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok karena sarana dan prasarana logistik yang belum memadai. Distribusi barang kebutuhan pokok yang belum efektif dan efisien.	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah.	Terbukanya pasar dalam era perdagangan bebas (MEA).	Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pengintegrasian dan perluasan	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.	Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
terbuka dengan adanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berkembangnya sistem pemasaran secara online yang dapat meningkatkan jaringan distribusi. Banyaknya event pameran yang difasilitasi pemerintah daerah untuk membantu promosi IKM. Sudah terbentuknya kluster dan sentra industri di Kota Semarang.				pasar dalam negeri.		
Adanya komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan pasar tradisional sebagai upaya menghadapi persaingan.	Kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional masih rendah dan belum memadai untuk kenyamanan pedagang dan konsumen. Persaingan dengan pusat perbelanjaan modern yang terus hadir.	Kondisi pengolahan sampah di Kota Semarang belum optimal. Masih kurangnya dukungan prasarana sanitasi dan limbah yang mendukung keberlanjutan lingkungan.	-	Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN).	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah.	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
Adanya mandat dan kewenangan Dinas untuk melakukan pengawasan barang beredar dan kemetrologian.	Kurangnya pengawasan barang beredar dan kemetrologian. Rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	-	-	Peningkatan perlindungan konsumen , dengan indikator seperti Indeks Keberdayaan Konsumen dan persentase alat-alat UTTP yang bertanda tera	-	Perlindungan terhadap konsumen belum optimal.

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
				sah yang berlaku.		
Terbukanya pasar ekspor melalui MEA. Berkembangnya sistem pemasaran online. Dukungan pemerintah dalam fasilitasi pameran.	UMKM mengalami kesulitan menembus pasar ekspor karena kualitas produk yang kalah bersaing. Keterbatasan transportasi/distribusi untuk ekspor. Lemahnya daya saing serta belum optimalnya pengembangan mutu desain dan merk dagang. Ketergantungan pada bahan baku impor yang membuat harga produk tinggi. Rendahnya penguasaan internet oleh IKM untuk pemasaran online.	Masih kurangnya dukungan ekonomi hijau.	Tuntutan untuk bisa bersaing dengan produk dari negara lain di era perdagangan bebas (MEA).	Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.	Rendahnya akses UMKM terhadap pasar ekspor.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Perdagangan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perdagangan Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perdagangan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Perdagangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perdagangan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan wilayah

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah.
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perdagangan.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan wilayah		LPE Sektor Perdagangan	%	4±1	5±1	5±1	5±1	5±1	5±1	
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Nilai PDRB Perdagangan	milyar rupiah	36.374,54	38.193,27	40.102,93	42.108,08	44.213,48	46.424,16	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perdagangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan	Angka	76	77	78	79	80	81	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perdagangan	Angka	97	97,25	97,5	97,75	98	98,25	

Keterangan:

19	Sasaran dalam dokumen RPJMD yang dapat didukung oleh PD terkait
20	Tujuan PD minimal 1 kalimat tujuan
21	Sasaran Perangkat Daerah
22	Indikator tujuan maupun sasaran
23	Satuan dari indikator
24	Target indikator
25	Target indikator
26	Target indikator
27	Target indikator
28	Target indikator
29	Target indikator
30	Dapat diisi definisi operasional atau rumus indikator

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perdagangan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Perdagangan dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Optimalisasi Penyediaan Fasilitas dan Sarana Penyaluran Produk Perdagangan	Optimalisasi Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Peningkatan Promosi, Peningkatan Citra Produk dan Akses Produk Ekspor bagi Pelaku Usaha	Peningkatan Kualitas Fasilitas Sarana Pelayanan UTTP dan Pengawasan Mutu Produk	Melakukan Peningkatan Promosi Penggunaan Produk Lokal dan Kemitraan Produk Lokal dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi

3.2.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perdagangan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perdagangan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara

bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perdagangan.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Peningkatkan Pengelolaan dan Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap tim pengelola sarana distribusi perdagangan	
			Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana penerbitan izin usaha peerdagangan	
			Peningkatan Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Tingkat Inflasi Harga Komoditas Makanan	
			Meningkatkan Akses Produk Lokal dan Promosi Dagang bagi Produk Unggulan UMKM/Pelaku Usaha yang Potensial Ekspor	
			Peningkatan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Lokal di tingkat Kota	
			Peningkatan Kualitas dan Sarana Pelayanan Pengukuran UTTP dan Pengawasan Mutu Produk	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perdagangan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Perdagangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Outcome**	**Output**	**Indikator**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Ket**
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan wilayah				LPE Sektor Perdagangan		Kepala Dinas Perdagangan
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah			Nilai PDRB Perdagangan		Kepala Dinas Perdagangan
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan		Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kepala Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan
				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana	Kepala Bidang Pengembangan Prasara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				yang Terkelola	Perdagangan Terkelola	Distribusi Perdagangan	na dan Sarana Perdagangan
				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Koordinator Bangunan
				Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Koordinator Kebersihan Lingkungan
			Meningkatnya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan		Persentase Pengelola Sarana Distribusi yang Dibina	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kepala Bidang Penataan dan Penetapan
				Tersedianya Data Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kepala Bidang Penataan dan Penetapan
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Koordinator Pengawasan Sarana Perdagangan
			Meningkatnya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kepala Bidang Bina Usaha
				Tersedianya Data Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Diberdayakan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Diberdayakan	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kepala Bidang Bina Usaha

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksanannya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagagan	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi		Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitasi Harga
				Terlaksanany a penerbitan Izin Usaha Perdagangan	Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Sub Koordinator Pengendalian Usaha
				Tersedianya Rekomendasi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat ,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sub Koordinator Pengendalian Usaha
				Terlaksanany a pengawasan Fasilitas Penyimpanan	Persentase Fasilitas Penyimpanan yang Terawasi	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan	Sub Koordinator Pengendalian Usaha
				Terlaksanany a Pemeriksaan Penyimpanan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Sub Koordinator Pengend

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Bahan Berbahaya	Bahan Berbahaya		alian Usaha
				Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal	Persentase Dokumen Pengajuan Penerbitan SKA yang terlayani	Penerbitan Surat Keterangan Asal	Sub Koordinator Ekspor dan Impor
				Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Sub Koordinator Ekspor dan Impor
			Meningkatnya iklim perdagangan yang stabil dan adil		Koefisien harga antar waktu	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitasi Harga
				Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok	Tingkat Inflasi Komoditas Makanan	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Stabilitas Harga Barang
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Sub Koordinator Stabilitas Harga Barang
			Meningkatnya akses produk lokal ke pasar internasional		Nilai ekspor non migas	Program Pengembangan Ekspor	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitasi Harga
				Terselenggaranya promosi dagang melalui	Persentase Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan	Sub Koordinator Ekspor

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				pameran dan misi dagang	Pameran Dagang	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan Impor
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Nasional	Sub Koordinator Ekspor dan Impor
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	Sub Koordinator Ekspor dan Impor
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Sub Koordinator Ekspor dan Impor
				Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Sub Koordinator Ekspor dan Impor
			Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal		Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kepala Bidang Bina Usaha
				Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha
				Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
					Kabupaten/Kota		
				Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha
			Meningkatnya hak dan keamanan konsumen		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Kepala UPTD Metrologi Legal
				Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pelaku Usaha yang Diawasi dan Diukur Mutu Produknya	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	KaSubBag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal
				Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	KaSubBag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal
				Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang di bina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	KaSubBag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perdagangan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan; Indeks Kepuasan Masyarakat.		Kepala Dinas Perdagangan
			Terwujudnya		Persentase perencanaan	Program Penunjang	Sekretaris

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
			pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan		serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta pelaporan kinerja	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan yang dihasilkan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan	Kepala Sub Bagian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA- SKPD	Umum dan Kepegawaian
				Terlaksanany a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksanany a Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Akhir Tahun SKPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terwujudnya tertib administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD sesuai peraturan perundangan dalam rangka pencapaian target pendapatan	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksanany a Penyuluhan dan Penyebarluas an Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Retribusi Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perdagangan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian
				Terlaksanany a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian
				Terlaksanany a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian
				Terlaksanany a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian
				Terlaksanany a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kepala Sub Bagian Umum dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perundang-Undangan	Kepegawaian
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perdagangan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang	Kepala Sub Bagian Umum

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Cetakan dan Penggandaan	yang Disediakan	Cetakan dan Penggandaan	dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada SKPD	Persentase pemenuhan penyediaan barang milik daerah pada SKPD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kepala Sub Bagian Umum dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pemerintahan Daerah	Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perdagangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		Kepegawaian

Dinas Perdagangan Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Penguatan Daya Saing yang Mendukung Perekonomian Kota. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					73.345.710.583		81.396.118.088		84.900.030.157		85.543.649.014		87.061.812.609	
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.551.523.430		42.920.858.159		44.822.596.012		45.171.918.232		45.995.897.008	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas	%	100%	100%	29.663.693.406	100%	30.999.431.026	100%	32.400.755.528	100%	33.870.934.254	100%	35.463.397.797	
3.30.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					59.528.000		59.528.000		59.528.000		59.528.000		109.528.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan yang dihasilkan	dokumen	0	13	59.528.000	13	59.528.000	13	59.528.000	13	59.528.000	13	109.528.000	
3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.173.000		2.173.000		2.173.000		2.173.000		52.173.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	2.173.000	4	2.173.000	4	2.173.000	4	2.173.000	5	52.173.000	
3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	1	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	
3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	
3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan					1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	
3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	4	1.471.000	4	1.471.000	4	1.471.000	4	1.471.000	4	1.471.000	
3.30.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun									Ket
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.469.165.406		30.804.903.026		32.251.227.528		33.721.406.254		35.263.869.797	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	dokumen	0	12	29.469.165.406	12	30.804.903.026	12	32.251.227.528	12	33.721.406.254	12	35.263.869.797	
3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					29.114.752.406		30.450.490.026		31.851.814.528		33.321.993.254		34.864.456.797	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	219	219	29.114.752.406	219	30.450.490.026	219	31.851.814.528	219	33.321.993.254	219	34.864.456.797	
3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					350.000.000		350.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	395.000.000	12	395.000.000	12	395.000.000	
3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan					1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	
3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	1	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Semesteran SKPD														
3.30.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000		1.471.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	1	1.471.000	
3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah (Dinas Perdagangan) yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	%	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
3.30.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terwujudnya tertib administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD sesuai peraturan perundangan dalam rangka pencapaian target pendapatan	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD yang sesuai peraturan perundangan	%	0	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	
3.30.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	laporan	0	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	
3.30.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	dokumen	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.30.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perangkat Daerah														
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perdagangan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perdagangan	Nilai	0	70	40.000.000	71	40.000.000	72	40.000.000	73	40.000.000	74	40.000.000	
3.30.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan	%	100%	90,00%	8.932.830.024	90,50%	11.966.427.133	90,75%	12.421.840.484	91,00%	11.300.983.978	91,25%	10.532.499.211	
3.30.01.2.06 Administrasi Umum					1.395.000.000		1.735.000.000		1.740.000.000		1.740.000.000		1.540.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perangkat Daerah														
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	%	100%	100%	1.395.000.000	100%	1.735.000.000	100%	1.740.000.000	100%	1.740.000.000	100%	1.540.000.000	
3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	
3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		90.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	100.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	90.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	
3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	
3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		400.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	3	400.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	400.000.000	
3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu					150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	
3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat					400.000.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000		500.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	400.000.000	12	490.000.000	12	490.000.000	12	490.000.000	12	500.000.000	
3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
3.30.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	0	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					140.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	250.000.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada SKPD	Persentase pemenuhan penyediaan barang milik daerah pada SKPD	%	100%	100%	140.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	250.000.000	
3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					90.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		200.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	5	90.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	200.000.000	
3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					6.510.000.000		6.510.000.000		8.481.840.484		7.860.983.978		7.592.499.211	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemerintahan Daerah														
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perdagangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Kantor	%	100%	100%	6.510.000.000	100%	6.510.000.000	100%	8.481.840.484	100%	7.860.983.978	100%	7.592.499.211	
3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5.910.000.000		5.910.000.000		7.481.840.484		7.110.983.978		6.910.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	5.910.000.000	12	5.910.000.000	12	7.481.840.484	12	7.110.983.978	12	6.910.000.000	
3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					600.000.000		600.000.000		1.000.000000		750.000.000		682.499.211	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	600.000.000	12	600.000.000	12	1.000.000000	12	750.000.000	12	682.499.211	
3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik					887.830.024		3.371.427.133		1.850.000.000		1.350.000.000		1.150.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perdagangan	%	100%	100%	887.830.024	100%	3.371.427.133	100%	1.850.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.150.000.000	
3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					350.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	33	33	350.000.000	33	400.000.000	33	400.000.000	33	400.000.000	33	400.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun									Ket
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					337.830.024		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	460	460	337.830.024	460	450.000.000	460	450.000.000	460	450.000.000	460	450.000.000	
3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					200.000.000		2.521.427.133		1.000.000.000		500.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	200.000.000	2	2.521.427.133	2	1.000.000.000	2	500.000.000	2	300.000.000	
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					117.123.448		129.514.596		134.907.801		135.898.456		138.235.206	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100%	100%	117.123.448	100%	129.514.596	100%	134.907.801	100%	135.898.456	100%	138.235.206	
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat,					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan														
Terlaksananya penerbitan Izin Usaha Perdagangan	Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan	dokumen	2253	2000	50.000.000	2000	50.000.000	2000	50.000.000	2000	50.000.000	2000	50.000.000	
3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Rekomendasi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat ,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	dokumen	2253	2000	50.000.000	2000	50.000.000	2000	50.000.000	2000	50.000.000	2000	50.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik													
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					17.123.448		29.514.596		34.907.801		35.898.456		38.235.206	
Terlaksananya pengawasan Fasilitas Penyimpanan	Persentase Fasilitas Penyimpanan yang Terawasi	%	0	1	17.123.448	1	29.514.596	1	34.907.801	1	35.898.456	1	38.235.206	
3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya					17.123.448		29.514.596		34.907.801		35.898.456		38.235.206	
Terlaksananya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	laporan	0	12	17.123.448	12	29.514.596	12	34.907.801	12	35.898.456	12	38.235.206	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal				100	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal	Persentase Dokumen Pengajuan Penerbitan SKA yang terlayani	%	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	dokumen	0	50	50.000.000	75	50.000.000	100	50.000.000	125	50.000.000	150	50.000.000	
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					22.387.017.177		26.451.687.062		26.849.274.629		26.022.714.760		25.948.414.812	
Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dit Meningkatnya pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan ingkatkan	%	10%	10%	21.388.573.603	10%	23.891.960.491	10%	24.199.174.263	10%	24.439.290.857	10%	25.005.676.178	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					21.388.573.603		23.891.960.491		24.199.174.263		24.439.290.857		25.005.676.178	
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	unit	50	50	21.388.573.603	50	23.891.960.491	50	24.199.174.263	50	24.439.290.857	50	25.005.676.178	
3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					12.888.573.603		14.891.960.491		14.699.174.263		14.439.290.857		14.805.676.178	
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	50	50	12.888.573.603	50	14.891.960.491	50	14.699.174.263	50	14.439.290.857	50	14.805.676.178	
3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					8.500.000.000		9.000.000.000		9.500.000.000		10.000.000.000		10.200.000.000	
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	50	50	8.500.000.000	50	9.000.000.000	50	9.500.000.000	50	10.000.000.000	50	10.200.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase Pengelola Sarana Distribusi yang Dibina	%	100%	100%	5.500.000.000	100%	6.000.000.000	100%	6.500.000.000	100%	6.500.000.000	100%	6.500.000.000	
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000	
Tersedianya Data Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	korwil	6	6	5.500.000.000	6	6.000.000.000	6	6.500.000.000	6	6.500.000.000	6	6.500.000.000	
3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	12	12	5.500.000.000	12	6.000.000.000	12	6.500.000.000	12	6.500.000.000	12	6.500.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Distribusi Perdagangan														
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang diberdayakan		100%	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					1.500.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Tersedianya Data Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Diberdayakan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Diberdayakan	korwil	6	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	2.000.000.000	6	2.000.000.000	6	2.000.000.000	
3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					1.500.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Terlaksanannya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					3.769.436.933		4.168.226.869		4.341.798.812		4.373.681.512		4.448.886.197	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien harga antar waktu	angka	9,55	10±1	3.769.436.933	10±1	4.168.226.869	10±1	4.341.798.812	10±1	4.373.681.512	10±1	4.448.886.197	
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					3.769.436.933		4.168.226.869		4.341.798.812		4.373.681.512		4.448.886.197	
Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok	Tingkat Inflasi Komoditas Makanan	angka	7,55	5±2	3.769.436.933	5±2	4.168.226.869	5±2	4.341.798.812	5±2	4.373.681.512	5±2	4.448.886.197	
3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang					3.769.436.933		4.168.226.869		4.341.798.812		4.373.681.512		4.448.886.197	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	12	12	3.769.436.933	12	4.168.226.869	12	4.341.798.812	12	4.373.681.512	12	4.448.886.197	
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					499.916.947		552.805.973		575.825.739		580.054.143		590.028.072	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor non migas	US$	1.443.742.642	1.561.552.042	499.916.947	1.624.014.123	552.805.973	1.688.974.688	575.825.739	1.756.533.676	580.054.143	1.826.795.023	590.028.072	
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui					499.916.947		552.805.973		575.825.739		580.054.143		590.028.072	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Terselenggaranya promosi dagang melalui pameran dan misi dagang	Persentase Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	%	10%	10%	499.916.947	10%	552.805.973	10%	575.825.739	10%	580.054.143	10%	590.028.072	
3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional					199.916.947		242.805.973		255.825.739		250.054.143		260.028.072	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha	5	5	199.916.947	5	242.805.973	5	255.825.739	5	250.054.143	5	260.028.072	
3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		130.000.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	0	10	100.000.000	10	110.000.000	10	120.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	20	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.143.381.928		1.264.346.733		1.316.996.247		1.326.667.215		1.349.479.024	
Meningkatnya hak dan keamanan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	84,97%	92,12%	1.143.381.928	93,24%	1.264.346.733	94,36%	1.316.996.247	95,49%	1.326.667.215	96,61%	1.349.479.024	
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal,					1.143.381.928		1.264.346.733		1.316.996.247		1.326.667.215		1.349.479.024	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan														
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pelaku Usaha yang Diawasi dan Diukur Mutu Produknya	%	90%	92%	1.143.381.928	93%	1.264.346.733	94%	1.316.996.247	95%	1.326.667.215	96%	1.349.479.024	
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					743.381.928		800.000.000		836.996.247		840.000.000		856.479.024	
Mingkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang ditera dan tera ulang	unit	62184	51225	743.381.928	54884	800.000.000	58543	836.996.247	62202	840.000.000	65861	856.479.024	
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				240	400.000.000	240	464.346.733	240	480.000.000	240	486.667.215	240	493.000.000	
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang di bina	orang	360	240	400.000.000	240	464.346.733	240	480.000.000	240	486.667.215	240	493.000.000	
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN					875.754.294		968.405.267		1.008.731.283		1.016.138.599		1.033.610.924	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	%	80%	100%	875.754.294	100%	968.405.267	100%	1.008.731.283	100%	1.016.138.599	100%	1.033.610.924	
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					875.754.294		968.405.267		1.008.731.283		1.016.138.599		1.033.610.924	
Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%	80%	100%	875.754.294	100%	968.405.267	100%	1.008.731.283	100%	1.016.138.599	100%	1.033.610.924	
3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					700.000.000		788.405.267		820.000.000		826.138.599		843.000.000	
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	100	120	700.000.000	120	788.405.267	120	820.000.000	120	826.138.599	120	843.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					175.754.294		180.000.000		188.731.283		190.000.000		190.610.924	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	240	150	175.754.294	150	180.000.000	150	188.731.283	150	190.000.000	150	190.610.924	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	LPE Sektor Perdagangan	persen	4±1	5±1	5±1	5±1	5±1	5±1	
2	Nilai PDRB Perdagangan	milyar rupiah	36.374,54	38.193,27	40.102,93	42.108,08	44.213,48	46.424,16	

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan
Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	91	92,12	93,24	94,36	95,49	96,61	
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	89	90	91	92	93	94	

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	91,27	92,53	93,8	95,07	96,33	97,6	
5	Disparitas Harga	%	±10,00	±10,00	±10,00	±10,00	±10,00	±10,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Perdagangan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perdagangan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perdagangan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan.

Permasalahan Dinas Perdagangan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Perdagangan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Perdagangan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Perdagangan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Dinas Perdagangan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

27. DINAS PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perindustrian Kota Semarang maka Dinas Perindustrian Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang Perindustrian, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Permendagri No. 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, Lembaran Daerah tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173;
24. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang;
25. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Perindustrian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Perindustrian Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya Bidang Perindustrian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.]

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian Kota Semarang mempunyai fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika Dan Elektronika, Bidang Industri Kimia Dan Tekstil, Bidang Industri Agro Dan Hasil Hutan Dan Bidang Aneka Industri.
b. Perumusan Rencana Strategis Sesuai Dengan Visi Dan Misi Wali kota
c. Pengkoordinasian Tugas-Tugas Dalam Rangka Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Kesekretariatan, Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan, Telematika Dan Elektronika, Bidang Industri Kimia Dan Tekstil, Bidang Industri Agro Dan Hasil Hutan, Bidang Aneka Industri Dan UPTD.
d. Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pegawai Dinas.
e. Penyelenggaraan Kerja Sama Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika Dan Elektronika, Bidang Industri Kimia Dan Tekstil, Bidang Industri Agro Dan Hasil Hutan, Bidang Aneka Industri Dan UPTD.
f. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas; Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika Dan Elektronika, Bidang Industri Kimia Dan Tekstil, Bidang Industri Agro Dan Hasil Hutan, Dan Bidang Aneka Industri.
g. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
h. Penyelenggaraan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika Dan Elektronika, Bidang Industri Kimia Dan Tekstil, Bidang Industri Agro Dan Hasil Hutan, Bidang Aneka Industri Dan UPTD.
i. Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.
j. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Wali kota Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

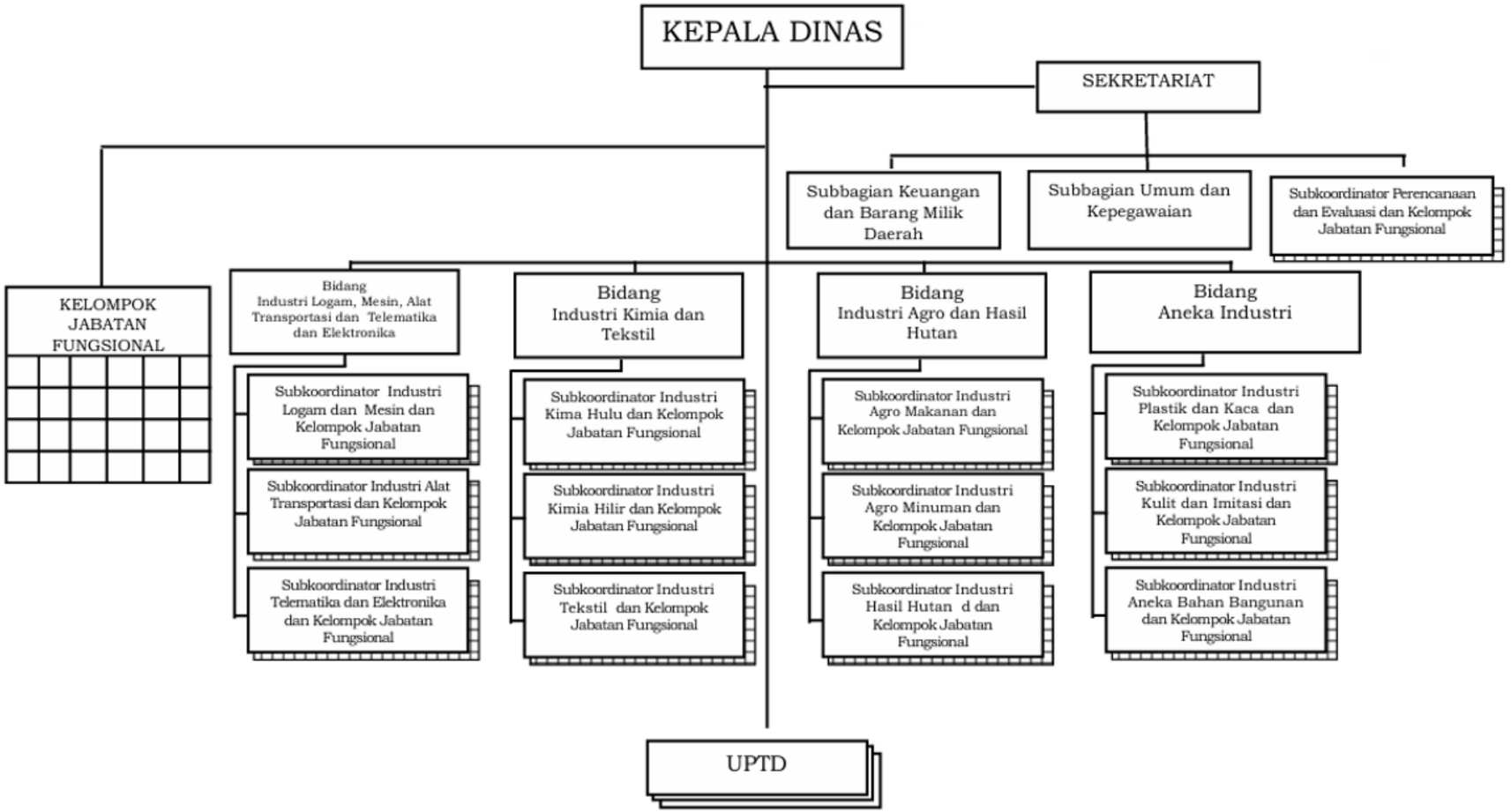

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Keterangan : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kota Semarang sesuai dengan Perwal Kota Semarang No 116 Tahun 2021

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perindustrian Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Telematika dan Elektronika, Bidang Industri Kimia dan Tekstil, Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan, dan Bidang Aneka Industri.

   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

   Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran;
   b. Pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai Dalam Lingkup Tanggungjawabnya;
   c. Pengkoordinasian, Sinkronisasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Evaluasi Tugas-Tugas Kesekretariatan, Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika Dan Elektronika, Bidang Industri Kimia Dan Tekstil, Bidang Industri Agro Dan Hasil Hutan, Bidang Aneka Industri
   d. Pelaksanaan Fasilitasi Tugas-Tugas Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika Dan Elektronika, Bidang Industri Kimia Dan Tekstil, Bidang Industri Agro Dan Hasil Hutan, Dan Bidang Aneka Industri
   e. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Dengan Instansi Dan Pihak Terkait
   f. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Di Sekretariat Dinas;Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kinerja Tahunan, Pengelolaan Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur, Serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Manajemen Risiko Dinas
   g. Pelaksanaan Koordinasi Dan Verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
   h. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Dinas
   i. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
   j. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Dinas
   k. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Aset Dan Barang Milik Daerah Dinas
   l. Pelaksanaan Pengelolaan Gaji Dan Tunjangan Di Lingkungan Dinas

m. Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan/Pengawasan
n. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Dan Perbaikan Barang Milik Daerah Dinas;
o. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, Dan Manajemen Perubahan Serta Pengembangan Inovasi Dinas
p. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan, Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah, Penjaminan Mutu, Serta Manajemen Sumber Daya Dinas
q. Pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas
r. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas
s. Pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas
t. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas
u. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas
v. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas
w. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas
x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan, dan
y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:
a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Industri Logam dan Mesin, Industri Alat Transportasi, dan Industri Telematika dan Elektronika.
Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran
b. Pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai Dalam Lingkup Tanggungjawabnya
c. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Dan Pihak Terkait

d. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika Dan Elektronika
e. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Berkaitan Dengan Penerbitan, Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah Izin Perluasan Usaha IKM Industri Logam Dan Mesin
f. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Industri Logam Dan Mesin
g. Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Kepastian Berusaha Terhadap Usaha Industri Logam Dan Mesin
h. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Industri Logam Dan Mesin
i. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Asosiasi Industri Logam Dan Mesin
j. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Industri Logam Dan Mesin
k. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Berkaitan Dengan Penerbitan, Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah Izin Perluasan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Industri Alat Transportasi
l. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Industri Alat Transportasi
m. Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Kepastian Berusaha Terhadap Usaha Industri Alat Transportasi
n. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Industri Alat Transportasi
o. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Asosiasi Industri Alat Transportasi
p. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Di Bidang Industri Alat Transportasi
q. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Dan Informasi Di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika Dan Elektronika
r. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika Dan Elektronika.
s. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Serta Penyusunan Laporan Program Dan Kegiatan, Dan
t. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Telematika dan Elektronika terdiri atas:
a. Subkoordinator Industri Logam dan Mesin
b. Subkoordinator Industri Alat Transportasi
c. Subkoordinator Industri Telematika dan Elektronika.

Subkoordinator Industri Logam dan Mesin, Industri Alat Transportasi, Industri Telematika dan Elektronika dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Telematika dan Elektronika.

4. Bidang Industri Kimia dan Tekstil

Bidang Industri Kimia dan Tekstil mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Industri Kimia Hulu, Industri Kimia Hilir dan Industri Tekstil.

Bidang Industri Kimia dan Tekstil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Industri Kimia dan Tekstil menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran
b. Pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai Dalam Lingkup Tanggungjawabnya
c. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Dan Pihak Terkait;
d. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Di Bidang IKT
e. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Berkaitan Dengan Penerbitan, Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah Izin Perluasan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Industri Kimia Hulu
f. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Industri Kimia Hulu
g. Pelaksanaan Kegiatan Perlindunghan Kepastian Berusaha Terhadap Usaha Industri Kimia Hulu
h. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek SDM Industri Kimia Hulu
i. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Asosiasi Industri Kimia Hulu
j. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Kimia Hulu
k. Pelaksanaan Usaha Penyediaan Sumber Daya Energi Alternatif Melalui Pemanfaatan Tenaga Panas Bumi
l. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Berkaitan Dengan Penerbitan, Izin Usaha Industri Kecil Da Menengah Izin Perluasan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Industri Kimia Hilir
m. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Industri Kimia Hilir
n. Pelaksanaan Kegiatan Perlindunghan Kepastian Berusaha Terhadap Usaha Industri Kimia Hilir
o. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Industri Kimia Hilir
p. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Asosiasi Industri Kimia Hilir
q. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Industri Kimia Hilir
r. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Berkaitan Dengan Penerbitan, Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah Izin Perluasan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Industri Tekstil
s. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Industri Tekstil
t. Pelaksanaan Kegiatan Perlindunghan Kepastian Berusaha Terhadap Usaha Industri Tekstil
u. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sdm Industri Tekstil
v. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Asosiasi Industri Tekstil
w. Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Industri Tekstil
x. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Dan Informasi Di Bidang Industri Kimia Dan Tekstil

y. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Di Bidang Industri Kimia Dan Tekstil
z. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Serta Penyusunan Laporan Program Dan Kegiatan, dan
aa. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Bidang Industri Kimia dan Tekstil terdiri atas:
a. Subkoordinator Industri Kimia Hulu
b. Subkoordinator Industri Kimia Hilir
c. Subkoordinator Industri Tekstil

Subkoordinator Industri Kimia Hulu, Industri Kimia Hilir, Industri Tekstil dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Kimia dan Tekstil.

5. Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan

Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Industri Agro Makanan, Industri Agro Minuman dan Industri Hasil Hutan.

Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran
b. Pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai Dalam Lingkup Tanggungjawabnya
c. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Dan Pihak Terkait
d. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Di Bidang Industri Agro Makanan, Minuman Dan Hasil Hutan
e. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Berkaitan Dengan Penerbitan, Izin Usaha IKM, Izin Perluasan Usaha IKM Industri Agro Makanan, Minuman Dan Hasil Hutan
f. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan IKM Industri Agro Makanan, Minuman Dan Hasil Hutan.
g. Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Kepastian Berusaha Terhadap Usaha Industri Agro Makanan, Minuman Dan Hasil Hutan
h. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Industri Agro Makanan, Minuman Dan Hasil Hutan
i. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Asosiasi Industri Agro Makanan, Minuman Dan Hasil Hutan
j. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Industri Agro Makanan, Minuman Dan Hasil Hutan
k. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Industri Agro Makanan, Minuman Dan Hasil Hutan
l. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Di Bidang Industri Agro Dan Hasil Hutan
m. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Serta Penyusunan Laporan Program Dan Kegiatan; Dan
n. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan terdiri atas:
a. Subkoordinator Industri Agro Makanan
b. Subkoordinator Industri Agro Minuman
c. Subkoordinator Industri Hasil Hutan

Subkoordinator Industri Agro Makanan, Industri Agro Minuman, Industri Hasil Hutan, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan.

6. Bidang Aneka Industri

Bidang Aneka Industri mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Industri Plastik dan Kaca, Industri Kulit dan Imitasi, dan Industri Aneka Bahan Bangunan.

Bidang Aneka Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aneka Industri menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran
b. Pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai Dalam Lingkup Tanggungjawabnya
c. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Dan Pihak Terkait
d. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Di Bidang Aneka Industri
e. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Berkaitan Dengan Penerbitan, Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah Izin Perluasan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Industri Plastik Dan Kaca, Kulit Dan Imitasi, Dan Aneka Bangunan
f. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Industri Plastik Dan Kaca, Kulit Dan Imitasi, Dan Aneka Bangunan
g. Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Kepastian Berusaha Terhadap Usaha Industri Plastik Dan Kaca, Kulit Dan Imitasi, Dan Aneka Bangunan
h. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Industri Plastik Dan Kaca, Kulit Dan Imitasi, Dan Aneka Bangunan
i. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Asosiasi Industri Plastik Dan Kaca, Kulit Dan Imitasi, Dan Aneka Bangunan
j. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Di Bidang Industri Plastik Dan Kaca, Kulit Dan Imitasi, Dan Aneka Bangunan;
k. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Dan Informasi Di Bidang Industri Plastik Dan Kaca, Kulit Dan Imitasi, Dan Aneka Bangunan
l. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Di Bidang Industri Plastik Dan Kaca, Kulit Dan Imitasi, Dan Aneka Bangunan;
m. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Serta Penyusunan Laporan Program Dan Kegiatan, dan
n. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Bidang Aneka Industri terdiri atas:
a. Subkoordinator Industri Plastik dan Kaca
b. Subkoordinator Industri Kulit dan Imitasi
c. Subkoordinator Industri Aneka Bahan Bangunan.
Subkoordinator Industri Plastik dan Kaca, Industri Kulit dan Imitasi, Industri Aneka Bahan Bangunan dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aneka Industri.

7. UPTD
Pada Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam beberapa kualifikasi. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Tenaga alih daya /outsourcing		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	1	0	0	0	0	0	1
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	1	1	1	2	36	10	51
4	D3	1	2	0	0	0	0	3
5	S1	5	8	1	3	0	0	17
6	S2	4	8	0	0	0	0	12
7	S3	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**12**	**19**	**2**	**5**	**36**	**10**	**84**

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang

Dari jumlah pegawai sebanyak 84 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan jabatan dan golongan kepegawaian. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Perindustrian Kota Semarang

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	1	1	2
3	Golongan III	7	13	20
4	Golongan IV	3	5	8
	Jumlah	**12**	**19**	**31**

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
di Dinas Perindustrian Kota Semarang

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1	Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas)	1	0	1
2	Administrator/Sekdin/Kabid	1	4	5
3	Pengawas	0	2	2
4	Fungsional Utama	0	0	0
5	Fungsional Madya	0	0	0
6	Fungsional Muda	2	4	6
7	Fungsional Pertama	4	4	8
8	Fungsional Terampil	1	1	2
9	Pelaksana	3	4	7
10	Tenaga Alih daya/Outsourcing	36	10	46
11	PPPK	2	5	7
	Jumlah	**50**	**34**	**84**

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Aset Tanah Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	LUAS (M^2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK/ ALAMAT	STATUS TANAH			PENGGUNAAN	ASAL USUL	HARGA	KETERANGAN
					HAK	SERTIFIKAT					
						TANGGAL	NOMOR				
1	Tanah Sawah Irigasi	11673	2021	JL. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Karanganyar, Tugu, Semarang	Hak Pakai	30-Apr-98	HP 9	Sentra IKM Logam KIW	Serah Terima dari Sekda Kota Semarang No. BA = B/3418/030/VIII/2021	363.800.000	Ex-Bengkok - 50.16.03.00
2	Tanah Sawah Irigasi	7179	2021	JL. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Karanganyar, Tugu, Semarang	Hak Pakai	30-Apr-98	HP 11	Sentra IKM Logam KIW	Serah Terima dari Sekda Kota Semarang No. BA = B/3418/030/VIII/2021	422.400.000	Ex-Bengkok - 50.16.03.00
3	Tanah Sawah Irigasi	2663	2021	JL. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Karanganyar, Tugu, Semarang	Hak Pakai	30-Apr-98	HP 10	Sentra IKM Logam KIW	Serah Terima dari Sekda Kota Semarang No. BA = B/3418/030/VIII/2021	51.000.000	Ex-Bengkok - 50.16.03.00
4	Tanah Sawah Irigasi	3200	2021	JL. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Karanganyar, Tugu, Semarang	Belum Hak Pakai	30-Apr-98	-	Sentra IKM Logam KIW	Serah Terima dari Sekda Kota Semarang No. BA = B/3418/030/VIII/2021	88.400.000	Ex-Bengkok - 50.16.03.00

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang

Tabel 2.5.
Gedung dan Bangunan Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	KONDISI BANGUNAN	LUAS LANTAI (M²)	LETAK/ LOKASI ALAMAT	LUAS BANGUNAN (M²)	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Baik	1000	Kampung Malon	1000	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	7.273.084.023
2	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	1100.11	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	1100.11	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	3.550.480.255
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	326.77	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	326.77	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	2.008.392.753
4	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	300	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	300	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	850.157.570
5	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	30	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	30	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	150.726.189
6	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	269	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	269	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	950.280.036
7	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	269	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	269	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	960.434.292
8	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	538	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	538	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	1.685.712.366
9	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	319	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	319	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	1.089.896.366
10	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	269	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	269	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	914.634.780
11	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	312	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	312	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	1.077.877.949
12	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	269	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	269	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	915.143.948
13	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	169	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	169	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	778.858.032
14	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	169	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	169	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	686.267.484
15	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	169	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	169	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	661.042.852
16	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Baik	169	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	169	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	678.368.628
17	Taman Permanen	Baik	1466.39	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	1466.39	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	218.528.670

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	KONDISI BANGUNAN	LUAS LANTAI (M^2)	LETAK/ LOKASI ALAMAT	LUAS BANGUNAN (M^2)	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA
18	Bangunan Industri Bengkel	Kurang Baik	77	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	77	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	521.486.676
19	Bangunan Industri Bengkel	Baik	109.6	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	109.6	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	452.622.269
20	Bangunan Industri Bengkel	Baik	184.8	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	184.8	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	670.482.020
21	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Baik	76.8	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	76.8	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	422.492.491
22	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Baik	195.5	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	195.5	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	833.516.526
23	Pagar Permanen	Baik	62.104	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	62.104	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	260.772.105
24	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	49.6991	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	49.6991	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	175.616.869
25	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik	28	Jl. Raya Semarang - Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang	28	Milik Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	116.618.668

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024.

a. Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2020-2024 berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Pilihan Perindustrian yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian
Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Dinas Perindustrian Pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	Persen	27,50	27,54	28,66	28,7	28,72	28,62	28,75	28,87	28,78	28,35	104,07	104,39	100,73	100,28	98,71
2	Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah (IKM) Setiap Tahun / Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	IKM	15	20	25	25	30	17	41	45	50	98	113	205,00	180,00	200,00	326,67
3	Jumlah Penerbitan Izin Usaha yang menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian	Izin	-	400	1500	2000	2500	-	455	1557	3638	5258	-	113,75	103,80	181,90	210,32
4	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas	Persen	-	2,23	5,03	7,6	8,89	-	4,73	6,43	8,12	10,43	-	212,11	127,83	106,84	117,32
5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Nilai AKIP	Nilai	70	70	73	75	78,8	72,81	72,81	77,5	78,76	80	104,01	104,01	106,16	105,01	101,52

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
		13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
3	Satuan kinerja	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Secara umum capaian kinerja Dinas Perindustrian Kota Semarang dari tahun 2020-2024 sangat tinggi dengan rata2 capaian di atas 100%.
Rata-rata capaian Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB sebesar 101,64 %.
Rata-rata capaian Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah (IKM) Setiap Tahun / Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah sebesar 204, 93 %

Rata-rata capaian Jumlah Penerbitan Izin Usaha yang menjadi Kewenangan
Dinas Perindustrian sebesar 152,44 %.
Rata-rata capaian Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas sebesar 112,82 %.
Rata-rata capaian Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sebesar 100%.
Rata-rata capaian Nilai AKIP sebesar 104,42 %.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2020-2024. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2020-2024. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2020-2024.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian Kota Semarang

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total anggaran dinas perindustrian	10.093.531.218	34.449.809.242	23.243.657.659	25.463.805.989	21.203.156.546	9.560.213.130	32.857.600.953	20.601.829.122	23.214.680.261	19.562.794.690	94,72	95,38	88,63	91,17	92,26	27,52	26,16
Program Penunjang	-	9.367.984.446	9.504.021.972	9.114.021.604	9.631.976.028	-	8.421.470.205	8.903.874.189	8.401.529.041	9.075.761.680		89,90	93,69	92,18	94,23	-	-
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	-	24.157.823.047	13.319.218.767	15.400.398.898	8.863.166.344	-	23.681.890.400	11.338.494.541	13.916.808.570	8.080.311.956		98,03	85,13	90,37	91,17	-	-
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	97.989.980	296.950.000	316.460.000	1.899.448.900	-	57.111.048	262.670.880	291.993.000	1.636.603.754		58,28	88,46	92,27	86,16	-	-
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	826.011.769	123.466.920	632.925.487	808.565.274	-	697.129.300	96.789.512	604.349.650	770.117.300		84,40	78,39	95,49	95,24	-	-

Keterangan:

1	Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
3	Anggaran tahun kedua renstra disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
4	Anggaran tahun ketiga renstra disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
5	Anggaran tahun keempat renstra disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
6	Anggaran tahun elima renstra disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keterangan 2-6
7	Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keterangan 7 -11
8	Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun		
9	Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun		
11	Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

c. Kelompok Sasaran Layanan dan Mitra Dinas Perindustrian Kota Semarang dalam Pemberian Pelayanan

Tabel 2.8.
Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian

No	Jenis Layanan	Sasaran Layanan	Mitra Layanan
1	Pelayanan Fasilitasi Pelatihan dan Pameran	Pelaku Industri Kecil dan Menengah	Kecamatan/Kelurahan
2	Pelayanan Rekomendasi Perizinan Industri	Pelaku Industri Kecil dan Menengah	DPMPTSP, Kemenperin
3	Pelayanan Rekomendasi Sertifikasi PIRT	Pelaku Industri Kecil dan Menengah	DKK Semarang
4	Pelayanan Fasilitasi Sertifikasi HKI	Pelaku Industri Kecil dan Menengah	Kemenkumham
5	Pelayanan Fasilitasi Sertifikasi Halal	Pelaku Industri Kecil dan Menengah	Kemenag

d. Inovasi Dinas Perindustrian Kota Semarang
Pada Tahun 2023 Dinas Perindustrian Kota Semarang membuat Sistem Informasi Data Industri Kota Semarang ini memuat data industri yang tersaji dalam bentuk tabel/grafik dan spasial yang bisa diakses masyarakat/
stakeholder terkait di *website* https://dataindustri.semarangkota.go.id dan https://smartcity.semarangkota.go.id melalui perangkat laptop/komputer/
smartphone yang terkoneksi internet.
Sistem informasi ini memuat Data IKM yang tersebar di 16 Kecamatan dan IKM di Kawasan Industri di Kota Semarang.
Sistem informasi ini rencana akan dikembangkan sampai tahun 2027 dengan memasukkan IKM yang ada di sentra-sentra industri di Kota Semarang.

e. Penghargaan Dinas Perindustrian Kota Semarang
1) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) memberikan penghargaan kepada 27 pelaku IKM yang mengikuti empat Kegiatan meliputi Penghargaan One Village One Product (OVOP), Penghargaan Indonesia Food Innovation (IFI), Penghargaan Indonesia Fashion and Craft Awards (IFCA), dan Penghargaan Startup4Industry. Zee Batik, pelaku IKM binaan Dinas Perindustrian Kota Semarang berhasil Juara OVOP Bintang 3 untuk katagori produk kain Batik.
2) Dinas Perindustrian Kota Semarang menerima Apresiasi Pencapaian Pendataan Industri Kecil Tahun 2023 melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Perindustrian Kota Semarang berhasil meraih 5 besar dari 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3) Zee Batik, Pelaku industri Batik yang merupakan binaan Dinas Perindustrian Kota Semarang, berhasil meraih Bintang 3 OVOP katagori batik untuk tahun 2024 dari Kementerian Perindustrian.
4) Dinas Perindustrian Kota Semarang mendapatkan Penghargaan Terbaik 1 katagori Kabupaten/Kota Bidang Industri Kreatif Digital Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5) Dinas Perindustrian Kota Semarang menerima Apresiasi Pencapaian Pendataan Industri Kecil Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6) Dinas Perindustrian Kota Semarang mendapatkan Penghargaan Terbaik 1 katagori Kabupaten/Kota Bidang Industri Kreatif Digital Tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai berikut:

1) Belum adanya *Business matching* yang baik antara industri kecil dan industri besar sehingga produk industri kecil belum bisa terserap dengan baik.
2) Masih rendahnya produktivitas IKM terkait:
   a) Keterampilan SDM IKM yang belum memadai.
   b) Kapasitas Mesin/peralatan IKM yang belum optimal berdampak pada kualitas dan kuantitas produk.
   c) Strategi pemasaran yang belum tepat.
   d) Inovasi produk IKM yang kurang kompetitif.
3) Data industri yang belum akurat, *real-time*, dan terintegrasi untuk pengambilan kebijakan. Minimnya pemanfaatan *dashboard* analitik untuk monitoring perkembangan industri.
4) Terkait regulasi dan legalitas, masih Rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban legalitas usaha (NIB) maupun legalitas produk (PIRT, halal, SNI).
5) Pembinaan dan fasilitasi pelaku industri di Sentra Industri dan Kawasan Industri serta pengembangan sentra industri.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Mendorong Pelaku IKM untuk meningkatkan produksi dan penjualan, mengingat Pasar produk IKM skala Nasional maupun Internasional (ekspor) masih besar.
2) Berkembangnya teknologi digital yang mendorong kemajuan di berbagai sektor, melalui Sistem pemasaran melalui media elektonik (online) dapat mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi penjualan bagi IKM dan mendorong membuka pasar ekspor.
3) Banyaknya event pameran lokal/nasional diharapkan dapat membantu IKM dari sisi promosi dan pemasaran.
4) Terbentuknya sentra-sentra industri dan adanya beberapa kawasan industri di Kota Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku industri/IKM untuk mengembangkan jaringan serta melakukan inovasi produknya melalui *business matching*.
5) Tumbuhnya industri kreatif di berbagai sektor menjadi peluang *start up* untuk berkembang, menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru.
6) Berkembangnya toko Swalayan, mall dan hotel di kota semarang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran produk-produk IKM.
7) Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang, dengan tersedianya Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun Kereta

api Tawang dan Poncol, dan beberapa terminal bus/angkutan di Kota Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan distribusi produknya

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perindustrian Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perindustrian Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kota Semarang yaitu: “Belum optimalnya kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam ekonomi sektor perdagangan dan jasa” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam ekonomi sektor perdagangan dan jasa”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya penguatan dan pengembangan IKM	Keterbatasan kompetensi SDM IKM dalam mengembangkan produk yang kompetitif dan belum adanya akses pasar yang baik
		Masih banyak IKM yang belum memiliki legalitas dan standarisasi produk
2	Belum optimalnya penguatan dan pengembangan Sentra IKM	Belum adanya RPIK di Kota Semarang
		Potensi Sentra IKM belum terpetakan dengan baik
		Rantai pasok belum terintegrasi antar pelaku industri dan kendala mutu
		Banyaknya Produk Pangan, Obat, Kosmetik, Hasil Sembelihan dan Jasa Sembelihan yang belum bersertifikasi halal
3	Belum optimalnya pengawasan perizinan industri	Belum optimalnya fasilitas pengawasan perizinan IKM
		Masih adanya IKM yang belum memenuhi perizinan usaha industri
4	Belum adanya data industri yang memadai	Masih rendahnya pelaku IKM yang terdaftar di SIINas
		Kurangnya diseminasi dan publikasi tentang SIINas
		Banyak pelaku IKM yang belum melaporkan SIINas secara berkala

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Terkait Dinas Perindustrian adalah masih rendahnya produktivitas.

Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dan menyebabkan menurunannya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

Produktivitas perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Pelaku IKM perlu didorong agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Disrupsi teknologi akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan di masa depan, diantaranya: Digitalisasi usaha pada IKM dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha.

Pengembangan kawasan strategis ekonomi di Kota Semarang diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan adanya rencana pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru maupun peningkatan kawasan strategis yang sudah ada. Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, antara lain:

1. Penanganan Banjir
2. Penguatan Ketahanan Pangan
3. Kota Inklusif
4. Peningkatan Gizi Masyarakat
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dinas Perindustrian Kota Semarang berperan serta dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Strategi utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui program-program Peningkatan Produktivitas Masyarakat dengan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan program lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian melaksanakan program intervensi Kelompok Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat, meliputi :

Pengembangan Ekonomi/UMKM dengan bentuk intervensi yaitu pelatihan-pelatihan dan fasilitasi perijinan usaha, serta penguatan ekonomi hijau pada sektor umkm dan industri kota.

Pelaksanaan program intervensi tersebut kepada masyarakat miskin ekstrem yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Semarang (setelah melalui proses verifikasi dan validasi)

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka Visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“ **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari Dan Inklusif** ”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas ekspor-impor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan

masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya.

Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi **"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif"**, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas

Dinas Perindustrian mengampu pada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada Misi ke-4 bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, *bussiness matching* dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dinas Perindustrian Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Arah kebijakan seperti yang terlihat pada gambar 2.2.

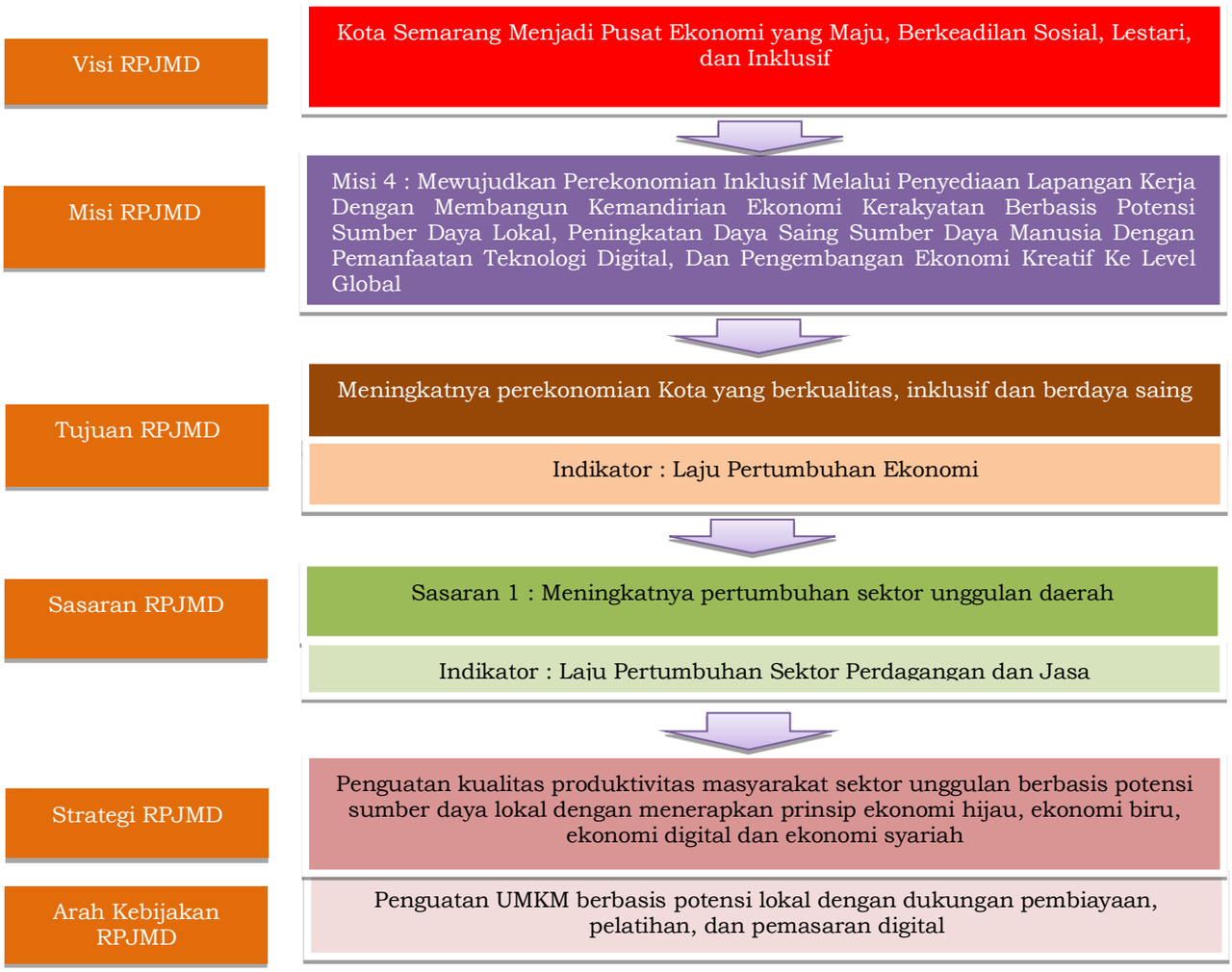

Gambar 2.2. Kontribusi Dinas Perindustrian dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait, Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja.

Tujuan Pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai Misi ke-4 ini adalah Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing.

Tujuan ini diimplementasikan dengan meningkatkan potensi sumber daya lokal yang berdaya saing global berlandaskan riset dan inovasi. potensi sumber daya lokal yang melimpah. Produk-produk unggulan, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif, didorong untuk masuk ke pasar global melalui promosi internasional dan pengembangan jaringan perdagangan. Hal ini dapat menjadikan Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang maju.

Dinas Perindustrian Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

c. **Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian**

Sesuai Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025, Dinas Perindustrian Kota Semarang mendukung Kegiatan Prioritas Industri Halal dan UMKM Halal dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri dan UMKM halal dengan indikator Persentase peningkatan daya saing industri yang memproduksi produl halal.

Dinas Perindustrian Kota Semarang mendukung program Pemerintah pusat dan berkomitmen penuh mendukung pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam menyiapkan serta memperluas akses terhadap sertifikasi produk halal. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, antara lain:

1. Fasilitasi Sertifikasi Halal
   Menyediakan pendampingan bagi UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal
2. Sosialisasi dan Edukasi
   Menyelenggarakan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi daya saing produk IKM.
   Memberikan edukasi terkait proses produksi yang sesuai standar halal dan manfaat ekonomi dari produk bersertifikat halal.
3. Pendampingan Teknis
   Memfasilitasi pelatihan teknis agar produk UMKM mampu memenuhi standar halal, higienis, dan berkualitas.
4. Kolaborasi Lintas Pihak
   Bekerjasama dengan BPJPH, Kementerian Perindustrian untuk mempercepat sertifikasi.
5. Peningkatan Daya Saing
   Menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, agar produk IKM mampu menembus pasar modern, e-commerce, hingga ekspor.

Dinas Perindustrian Kota Semarang berkomitemen memfasilitasi sertifikasi halal pada Industri Makanan dan Minuman, Industri Fesyen Muslim, dan Industri Farmasi dan Kosmetik. Juga akan dilakukan Penguatan Promosi Industri Halal di Kota Semarang.

d. **Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE) dengan indikator Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian (persentase).

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian dengan indikator PDRB Sektor Perindustrian (Milyar rupiah)

Dalam rangka pelaksanaan Program Daerah maka dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sebanyak 35 Program Daerah didelegasikan kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk diselaraskan dengan program daerah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai
"Program Delegasi" Provinsi ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Dinas Perindustrian Kota Semarang mendukung Program Provinsi yang didelegasikan kepada Kota Semarang yaitu:

NO	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM DELEGASI
1	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi produk UMKM dan IKM secara masif
		Pendampingan sertifikasi Halal, P-IRT dan HAKI secara Gratis
2	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis ekonomi hijau seperti pengembangan produk Batik Ecoprint

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perindustrian Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang dalam lima tahun mendatang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perindustrian Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Dinas Perindustrian Kota Semarang tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian Kota Semarang tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Dinas Perindustrian Kota Semarang dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah terkait Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.

Tabel 2.10.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian Kota Semarang

Tema Isu	Isu-Isu Yang Masuk Kriteria Strategis
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Masih kurangnya kontribusi sektor terhadap kesejahteraan
	2. Belum optimalnya dukungan sektor keuangan

Dinas Perindustrian Kota Semarang mendukung dan berusaha merealisasikan capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029 antara lain Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur, Proporsi Industri Kecil Dengan Pinjaman atau Kredit.

Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra, Renstra Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Isu Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lokasi Kota Semarang yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan menjadi hub bagi daerah lain	Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Geo ekonomi Perkembangan Teknologi: a. Digitalisasi usaha pada UMKM dan koperasi dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha. b. Sektor manufaktur mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi, serta teknologi hijau termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan	Masih Rendahnya Produktivitas: kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia:	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaka Kecil pada tahun 2026

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Keterangan:

1	Potensi kelebihan dari daerah
2	Permasalahan perangkat daerah yang terdapat di tabel 2.7
3	Isu KLHS yang terdapat di tabel 2.8
4	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang bersifat global yang relevan dengan urusan
5	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang level nasional yang relevan dengan urusan
6	Isu yang terdapat dokumen RPJMD Provinsi/Kab/Kota yang relevan dengan urusan
7	Hasil analisis isu strategis urusan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada Visi dan Misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Perindustrian Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian 2025-2029

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perindustrian Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi Bidang Perindustrian. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perindustrian Kota Semarang. Adapun tujuan Dinas Perindustrian Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung penambahan nilai ekonomi sektor perdagangan dan jasa.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

Meningkatnya daya saing IKM

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung penambahan nilai ekonomi sektor perdagangan dan jasa	-	Nilai PDRB Sektor Industri	Milyar Rupiah	76.620	77.386	78.160	78.941	79.731	80.528	
		Meningkatnya daya saing IKM	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung perdagangan dan jasa	%	2,07	2,12	2,17	2,22	2,28	2,33	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perindustrian	Nilai	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian	Nilai	85,25	85,50	85,75	86,00	86,25	86,50	

Keterangan:

19	Sasaran dalam dokumen RPJMD yang dapat didukung oleh PD terkait
20	Tujuan PD minimal 1 kalimat tujuan
21	Sasaran Perangkat Daerah
22	Indikator tujuan maupun sasaran
23	Satuan dari indikator
24	Target indikator
25	Target indikator
26	Target indikator
27	Target indikator
28	Target indikator
29	Target indikator
30	Dapat diisi definisi operasional atau rumus indikator

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perindustrian Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pengembangan Optimalisasi penguatan IKM; Penguatan dan Sentra IKM; Penguatan Pengawasan Perizinan Industri; Pengelolaan Data dan Informasi Industri; Penguatan tata kelola internal melalui peningkatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi; Peningkatan kualitas dan responsivitas pelayanan internal melalui pemenuhan standar pelayanan, inovasi layanan, dan penguatan budaya pelayanan prima	**Peningkatan** Optimalisasi penguatan IKM; Penguatan dan Sentra IKM; Penguatan Pengawasan Perizinan Industri; Pengelolaan Data dan Informasi Industri; Penguatan tata kelola internal melalui peningkatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi; Peningkatan kualitas dan responsivitas pelayanan internal melalui pemenuhan standar pelayanan, inovasi layanan, dan penguatan budaya pelayanan prima	**Penguatan** Optimalisasi penguatan IKM; Penguatan dan Sentra IKM; Penguatan Pengawasan Perizinan Industri; Pengelolaan Data dan Informasi Industri; Penguatan tata kelola internal melalui peningkatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi; Peningkatan kualitas dan responsivitas pelayanan internal melalui pemenuhan standar pelayanan, inovasi layanan, dan penguatan budaya pelayanan prima	**Percepatan** Optimalisasi penguatan IKM; Penguatan dan Sentra IKM; Penguatan Pengawasan Perizinan Industri; Pengelolaan Data dan Informasi Industri; Penguatan tata kelola internal melalui peningkatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi; Peningkatan kualitas dan responsivitas pelayanan internal melalui pemenuhan standar pelayanan, inovasi layanan, dan penguatan budaya pelayanan prima	**Perwujudan** Optimalisasi penguatan IKM; Penguatan dan Sentra IKM; Penguatan Pengawasan Perizinan Industri; Pengelolaan Data dan Informasi Industri; Penguatan tata kelola internal melalui peningkatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi; Peningkatan kualitas dan responsivitas pelayanan internal melalui pemenuhan standar pelayanan, inovasi layanan, dan penguatan budaya pelayanan prima

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perindustrian Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dengan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital	Peningkatan SDM IKM melalui pelatihan, sosialisasi, sertifikasi dan peningkatan akses pemasaran dan promosi produk melalui pameran	
			Peningkatan kualitas produk IKM dengan fasilitasi legalitas produk	
			Pembuatan RPIK	

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
			Pembentukan sentra industri baru dan penguatan sentra industri yang ada melalui tata kelola sentra dan pelatihan	
			Optimalisasi sentra industri melalui *business matching*, penguatan rantai pasok	
			Peningkatan Pengawasan Jaminan produk halal melalui site visit	
			Peningkatan pengawasan Perizinan IKM	
			Peningkatan pemenuhan Perizinan IKM	
			Penguatan data IKM melalui pendataan dan bimtek	
			Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Industri melalui diseminasi atau publikasi	
			Peningkatan Kewajiban Pelaporan Industri melalui *site visit*	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Dinas Perindustrian Kota Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Meningkatnya kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung penambahan nilai ekonomi sektor perdagangan dan jasa	-	-	-	Nilai PDRB Sektor Industri	-	Kepala Dinas
		Meningkatnya daya saing IKM	-	-	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung perdagangan dan jasa	-	Kepala Dinas
			Meningkatnya pelaku IKM yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal		Persentase Pertambahan IKM (%)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Bidang Industri Kimia Tekstil
				Meningkatnya Jumlah IKM	Pertambahan Jumlah IKM (angka)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Industri Kimia Hulu
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Industri Kimia Hulu
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Industri Kimia Hulu
			Meningkatnya sentra IKM sebagai pusat produksi dalam mendukung perekonomian lokal		Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM (%)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
				Meningkatnya Jumlah Sentra IKM	Pertambahan Jumlah Sentra IKM (angka)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Industri Alat Transportasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Industri Alat Transportasi
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Industri Alat Transportasi
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Industri Alat Transportasi
				Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi dan Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Industri Alat Transportasi
			Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi		Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Bidang Industri Agro dan hasil Hutan
				Meningkatnya Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi	Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Industri Hasil Hutan
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Industri Hasil Hutan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				yang berlokasi di satu Kab./Kota	yang berlokasi di satu Kab./Kota		
				Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Industri Hasil Hutan
			Meningkatnya efisiensi integrasi sistem pengelolaan industri nasional untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan sektor industri lokal		Persentase IKM yang terdaftar di SIINas	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bidang Aneka Industri
				Meningkatnya Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tim Kerja Industri kulit dan imitasi
				Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tim Kerja Industri kulit dan imitasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah dokumen hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Tim Kerja Industri kulit dan imitasi
				Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Tim Kerja Industri kulit dan imitasi
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perindustrian yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Perencanaan dan Evaluasi
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD))
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD)
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD)
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD))
				Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD)
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD)
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD)
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Subbag Keuangan Dan barang Milik Daerah (BMD)
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perindustrian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perindustrian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Subbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perindustrian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				masyarakat kepada Dinas Perindustrian	kepada Dinas Perindustrian yang selesai ditindaklanjuti		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perindustrian sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian

Dinas Perindustrian Kota Semarang Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu:

1. Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal.
2. Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM .
3. Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas.

Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal.	Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah supplier yang mendapat order dari pemerintah, jumlah supplier yang mendapat order ulang
				Fasilitasi business matching industri kecil dengan industri besar
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Standarisasi Produk Siap Jual
2	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Fasilitasi sertifikasi Halal
				Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif: Festival Industri Kreatif skala Nasional
				Operasional & Manajemen bisnis Sentra UMKM/IKM
				Pengadaan Peralatan/Mesin untuk Sentra IKM
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Operasional & Pemeliharaan Sentra IKM
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Fasilitasi sertifikasi HKI
3	Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina dan meningkat omsetnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kampanye bangga produk lokal
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Digital Marketing scale-up

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian
Kota Semarang

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Bidang Urusan Perindustrian				17.926.692.946,00		19.899.938.089,00		20.758.786.223,00		20.916.544.422,00		21.288.663.342,00	Kepala Dinas
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri				4.944.436.249,00		6.064.636.498,00		6.097.184.401,00		6.018.682.682,00		5.874.741.626,00	
Meningkatnya pelaku IKM yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal	Persentase Pertambahan IKM (%)	0,35	0,65	2.417.500.000,00	0,78	2.567.077.589,00	0,90	2.681.643.750,00	1,02	2.798.088.438,00	1,13	2.895.142.174,00	Bidang Industri Kimia dan Tekstil
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				4.944.436.249,00		6.064.636.498,00		6.097.184.401,00		6.018.682.682,00		5.874.741.626,00	
Meningkatnya Jumlah IKM	Pertambahan Jumlah IKM (angka)	20	25	2.417.500.000,00	30	2.567.077.589,00	35	2.681.643.750,00	40	2.798.088.438,00	45	2.895.142.174,00	Industri Kimia Hulu
3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19	32	2.217.500.000,00	32	2.355.327.589,00	32	2.457.731.250,00	32	2.561.580.312,00	32	2.645.583.642,00	Industri Kimia Hulu
3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6	7	200.000.000,00	7	211.750.000,00	7	223.912.500,00	7	236.508.126,00	7	249.558.532,00	Industri Kimia Hulu
Meningkatnya sentra IKM sebagai pusat produksi dalam mendukung perekonomian lokal	Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM (%)	83	87	2.526.936.249,00	90	3.497.558.909,00	93	3.415.540.651,00	97	3.220.594.244,00	100	2.979.599.452,00	Bidang Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika
Meningkatnya Jumlah Sentra IKM	Pertambahan Jumlah Sentra IKM (angka)	1	1	2.526.936.249,00	1	3.497.558.909,00	1	3.415.540.651,00	1	3.220.594.244,00	1	2.979.599.452,00	
3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1	3	82.500.000,00	3	86.625.000,00	3	90.956.250,00	3	95.504.062,00	3	100.279.266,00	Industri Alat Transportasi
3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri													

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6	6	250.000.000,00	6	272.500.000,00	6	295.125.000,00	6	317.881.250,00	6	330.000.000,00	Industri Alat Transportasi
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13	13	2.058.436.249,00	13	2.992.433.909,00	13	2.873.459.401,00	13	2.641.208.932,00	13	2.373.320.186,00	Industri Alat Transportasi
3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota													
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi dan Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	N/A	5	136.000.000,00	5	146.000.000,00	5	156.000.000,00	5	166.000.000,00	5	176.000.000,00	Industri Alat Transportasi
3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri													
Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas	6,72	6,73	523.000.000,00	6,74	553.750.000,00	6,75	585.737.500,00	6,76	619.024.375,00	6,77	653.822.750,00	Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi	Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi	32	38	523.000.000,00	41	553.750.000,00	44	585.737.500,00	48	619.024.375,00	52	653.822.750,00	Industri Hasil Hutan
3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota													
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2	5	237.000.000,00	5	253.000.000,00	5	269.550.000,00	5	286.677.500,00	5	304.411.375,00	Industri Hasil Hutan
3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan													

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)													
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2	8	286.000.000,00	8	300.750.000,00	8	316.187.500,00	8	332.346.875,00	8	349.411.375,00	Industri Hasil Hutan
3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional													
Meningkatnya efisiensi integrasi sistem pengelolaan industri nasional untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan sektor industri lokal	Persentase IKM yang terdaftar di SIINas	2,31	2,32	546.252.267,00	2,33	631.740.813,00	2,34	656.663.529,00	2,35	661.068.013,00	2,36	659.468.588,00	Bidang Aneka Industri
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	527	170	546.252.267,00	180	631.740.813,00	190	656.663.529,00	200	661.068.013,00	210	659.468.588,00	Tim Kerja Industri kulit dan imitasi
3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	8	508.752.267,00	9	565.000.000,00	9	573.250.000,00	9	581.912.500,00	9	572.500.000,00	Tim Kerja Industri kulit dan imitasi
3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan													

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas													
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah dokumen hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2	2	27.500.000,00	2	51.740.813,00	2	63.413.529,00	2	56.155.513,00	2	58.968.588,00	Tim Kerja Industri kulit dan imitasi
3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas													
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	23.000.000,00	1	28.000.000,00	Tim Kerja Industri kulit dan imitasi
3.31.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				11.913.004.430,00		12.649.810.778,00		13.419.200.793,00		13.617.769.352,00		14.100.630.378,00	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perindustrian yang berkualitas	100	100	6.938.846.902,00	100	7.224.782.527,00	100	7.576.890.048,00	100	7.945.978.056,00	100	8.434.692.966,00	Sekretaris
3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja perencanaan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	100	100	158.785.370,00	100	158.785.370,00	100	158.785.370,00	100	158.785.370,00	100	260.582.770,00	Perencanaan dan Evaluasi
3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	12.192.200,00	3	12.192.200,00	3	12.192.200,00	3	12.192.200,00	4	113.989.600,00	Perencanaan dan Evaluasi
3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.997.400,00	1	1.997.400,00	1	1.997.400,00	1	1.997.400,00	1	1.997.400,00	Perencanaan dan Evaluasi
3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.996.900,00	1	2.996.900,00	1	2.996.900,00	1	2.996.900,00	1	2.996.900,00	Perencanaan dan Evaluasi
3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.563.680,00	1	2.563.680,00	1	2.563.680,00	1	2.563.680,00	1	2.563.680,00	Perencanaan dan Evaluasi
3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.045.590,00	1	3.045.590,00	1	3.045.590,00	1	3.045.590,00	1	3.045.590,00	Perencanaan dan Evaluasi
3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	13.989.600,00	4	13.989.600,00	4	13.989.600,00	4	13.989.600,00	4	13.989.600,00	Perencanaan dan Evaluasi
3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	Perencanaan dan Evaluasi
3.31.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	NA	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Perencanaan dan Evaluasi
3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	100	100	6.727.975.932,00	100	7.063.911.557,00	100	7.416.019.078,00	100	7.785.107.086,00	100	8.172.024.596,00	Subbag Keuangan dan BMD
3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	36	6.470.376.492,00	36	6.793.827.917,00	36	7.133.451.238,00	36	7.490.055.046,00	36	7.864.488.356,00	Subbag Keuangan dan BMD
3.31.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	249.684.000,00	12	262.168.200,00	12	274.652.400,00	12	287.136.600,00	12	299.620.800,00	Subbag Keuangan dan BMD
3.31.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	5.040.080,00	1	5.040.080,00	1	5.040.080,00	1	5.040.080,00	1	5.040.080,00	Subbag Keuangan dan BMD
3.3101.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.090.080,00	1	1.090.080,00	1	1.090.080,00	1	1.090.080,00	1	1.090.080,00	Subbag Keuangan dan BMD

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	12	1.090.080,00	12	1.090.080,00	12	1.090.080,00	12	1.090.080,00	12	1.090.080,00	Subbag Keuangan dan BMD
3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	Subbag Keuangan dan BMD
3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	100	100	52.085.600,00	100	2.085.600,00	100	2.085.600,00	100	2.085.600,00	100	2.085.600,00	Subbag Keuangan dan BMD
3.31.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	NA	1	50.695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	Subbag Keuangan dan BMD
3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	Subbag Keuangan dan BMD
3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	1	695.200,00	Subbag Keuangan dan BMD
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perindustrian	89	90,00	4.974.157.528,00	90,5	5.425.028.251,00	90,75	5.842.310.745,00	91,00	5.671.791.296,00	91,25	5.665.937.412,00	
3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perindustrian	Persentase Nilai layanan kepegawaian Dinas Perindustrian	N/A	90	151.031.600,00	91	151.031.600,00	92	151.031.600,00	93	151.031.600,00	94	151.031.600,00	Subbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.31.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	12	1.031.600,00	12	1.031.600,00	12	1.031.600,00	12	1.031.600,00	12	1.031.600,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	70	150.000.000,00	70	150.000.000,00	70	150.000.000,00	70	150.000.000,00	70	150.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perindustrian	1	100	849.000.000,00	100	964.257.789,20	100	1.035.023.152,46	100	1.014.332.903,93	100	952.172.904,08	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	11	50.000.000,00	11	40.500.000,00	11	46.820.359,62	11	50.000.000,00	11	40.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	68	25	215.000.000,00	25	237.547.994,40	25	245.452.792,84	25	250.037.741,22	25	237.250.001,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	6	45.000.000,00	6	36.209.794,80	6	45.750.000,00	6	36.795.162,71	6	35.922.903,08	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu													
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32	12	60.000.000,00	12	68.000.000,00	12	75.000.000,00	12	77.500.000,00	12	75.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	12	320.000.000,00	12	350.000.000,00	12	382.000.000,00	12	370.000.000,00	12	375.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.3101.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	4	159.000.000,00	4	232.000.000,00	4	240.000.000,00	4	230.000.000,00	4	189.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	N/A	100	311.227.055,00	100	375.000.000,00	100	420.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA	10	311.227.055,00	10	375.000.000,00	10	420.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perindustrian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perindustrian yang selesai ditindaklanjuti	100	100	2.599.790.776,00	100	2.763.780.314,80	100	2.892.969.330,54	100	2.972.617.797,07	100	3.080.498.686,92	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	400.000.000,00	12	440.000.000,00	12	450.000.000,00	12	415.000.000,00	12	400.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	4	60.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	92.500.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.139.790.776,00	12	2.243.780.314,80	12	2.352.969.330,54	12	2.467.617.797,07	12	2.587.998.686,92	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perindustrian sesuai ketentuan	100	100	1.063.108.097,00	100	1.170.958.547,00	100	1.343.286.662,00	100	1.233.808.995,00	100	1.182.234.221,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	39.603.603,00	1	39.603.603,00	1	39.603.603,00	1	39.603.603,00	1	39.603.603,00	Subbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Urusan/Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Keterangan
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	17	288.504.494,00	17	317.354.944,00	17	331.780.168,00	17	346.205.392,00	17	360.630.618,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	NA	5	375.000.000,00	7	400.000.000,00	7	500.000.000,00	7	450.000.000,00	7	405.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	4	350.000.000,00	4	400.000.000,00	4	453.902.891,00	4	380.000.000,00	4	355.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	14.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	22.000.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Kota Semarang telah mengakomodir kegiatan Pengarus utamaan gender (PUG) melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi, dan mendukung Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak melalui kegiatan pendataan data Industri terkait pekerja anak di sektor Industri.

Dinas Perindustrian juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan pemberian pelatihan dan fasilitasi sertifikasi seperti halal dan P-IRT secara gratis dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian.

Stunting, yang mengacu pada kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak, yang berujung pada kualitas hidup yang rendah di masa depan yang dapat mempengaruhi generasi emas di masa depan. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian telah meluncurkan sejumlah inisiatif yang dirancang untuk menanggulangi stunting di antaranya melalui pelatihan olahan makanan yang berkontribusi pada perbaikan gizi ibu hamil dan anak.

Dalam rangka Penguatan Daya Saing Industri dan Jejaring Usaha perlu perlu dibangunnya Galeri Industri di sentra-sentra industri yang ada di Kota Semarang. selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pelatihan dan diskusi, sarana promosi dan pemasaran, media edukasi dan informasi, sarana jejaring (networking), pendorong pengembangan industri kreatif dan ikm, destinasi wisata industri.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Perindustrian Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai PDRB sektor industri	Milyar Rupiah	76.620	77.386	78.160	78.941	79.731	80.528	
2	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung perdagangan dan jasa	%	2,07	2,12	2,17	2,22	2,28	2,33	

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	3,18	3,72	4,26	4,8	5,34	5,88	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	18,16	22,35	26,95	31,94	37,30	40,74	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	31,25	37,50	43,75	50	56,25	62,5	
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	29,42	29,52	29,62	29,72	29,94	30,24	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Perindustrian Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Perindustrian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Permasalahan Perindustrian sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Perindustrian Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Perindustrian secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

28. SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan sangat penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah yang bersangkutan serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Sehubungan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang juga perlu memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Sekretariat Daerah, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Semarang.

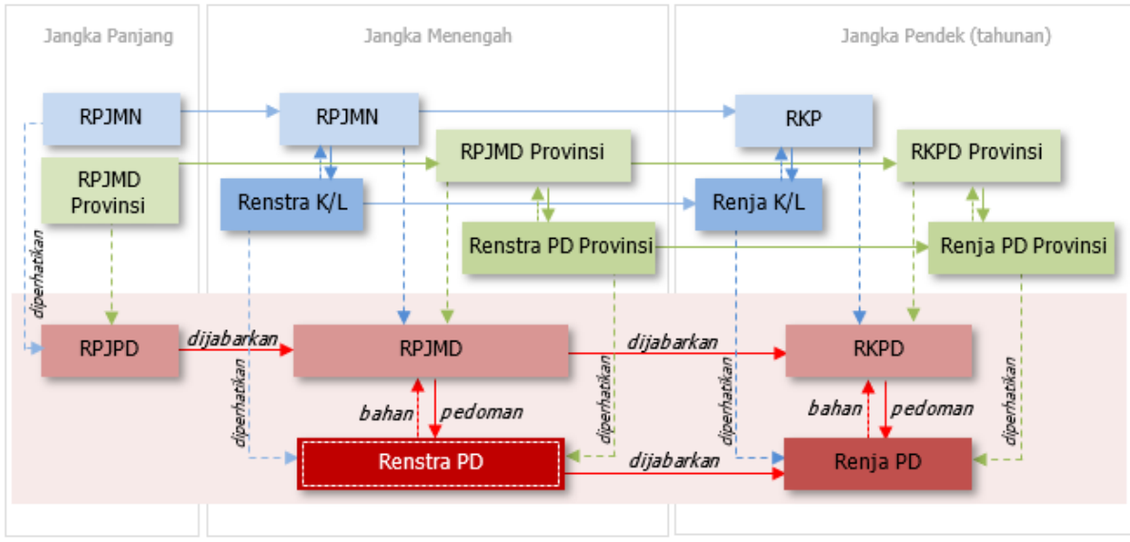

Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang -Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat Daerah Kota Semarang beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 adalah :

a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang;
b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya pada Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
c. Menyediakan acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Semarang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
d. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
Berisi gambaran pelayanan Sekretariat Daerah yang memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah. Selain itu, juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUPAN
Berisi memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Sekretariat Daerah adalah lembaga Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang, tugas pokok dari Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan daerah;
- penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- penyelenggaraan koordinasi tugas perangkat daerah;
- penyelenggaraan kebijakan daerah;
- pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
- pembinaan aparatur perangkat daerah;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- penyelenggaraan pelayanan administrasi Sekretariat Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

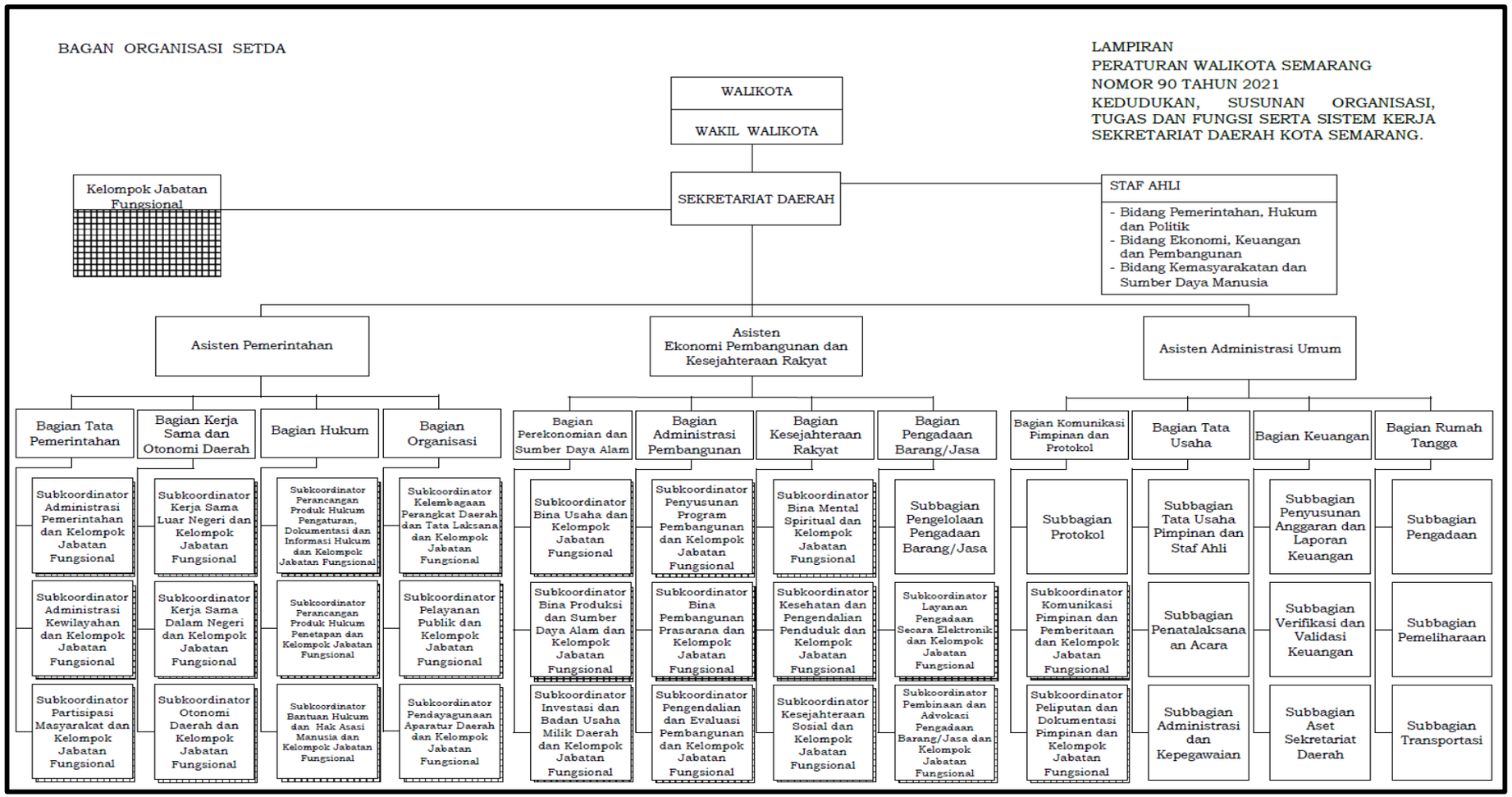

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

2.1.1.2. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang Tata Pemerintahan, Kerja Sama dan Otonomi Daerah, Hukum, dan Organisasi serta pelayanan administratif di lingkungan Asisten Pemerintahan.

Asisten Pemerintahan, terdiri dari:

- Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, dan Partisipasi Masyarakat.
- Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Kerja Sama Luar Negeri, Kerja Sama Dalam Negeri, dan Otonomi Daerah.
- Bagian Hukum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Perancangan Produk Hukum Pengaturan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Perancangan Produk Hukum Penetapan dan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bagian Organisasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Kelembagaan Perangkat Daerah dan Tata Laksana, Pelayanan Publik, dan Pendayagunaan Aparatur Daerah.

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pengadaan Barang/Jasa serta pelayanan administratif di lingkungan Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Bina Usaha, Subbagian Bina Produksi dan Sumber Daya Alam, dan Subbagian Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah.
- Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Penyusunan Program Pembangunan, Subbagian Bina Pembangunan Prasarana, dan Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
- Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi tugas Bina Mental Spiritual, Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, dan Kesejahteraan Sosial.

- Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan dan Rumah Tangga serta pelayanan administratif di lingkungan Asisten Administrasi Umum.

Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:

- Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Pemberitaan serta Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan.
- Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, Subbagian Penatalaksanaan Acara, dan Subbagian Administrasi dan Kepegawaian.
- Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan, Subbagian Verifikasi dan Validasi Keuangan, dan Subbagian Aset Sekretariat Daerah.
- Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Pengadaan, Subbagian Pemeliharaan, dan Subbagian Transportasi.

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Semarang

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Semarang pada Mei 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 271 pegawai, yang terbagi menjadi 188 orang PNS dan 83 orang PPPK.

Sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kota Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa komposisi. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Sekretariat Daerah Tahun 2025 (Per Mei 2025)

No	Tingkat Pendidikan	ASN	PPPK	Jumlah
1	SMP Sederajat	1	-	1
2	SMA Sederajat	25	22	47
3	D3	20	6	26
4	S1/D-IV	110	55	165
5	S2	32	-	32
6	S3	-	-	-
Jumlah		**188**	**83**	**271**

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 271 orang ini kemudian dapat ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Sekretariat Daerah Tahun 2025 (Per Mei 2025)

PNS

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV/c	3	-	3
2	Golongan IV/b	4	5	9
3	Golongan IV/a	4	1	5
4	Golongan III/d	13	22	35
5	Golongan III/c	10	13	23
6	Golongan III/b	8	15	23
7	Golongan III/a	26	39	65
8	Golongan II/d	6	-	6
9	Golongan II/c	8	11	19
Jumlah		**82**	**106**	**188**

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

PPPK

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan XI	-	-	-
2	Golongan X	-	-	-
3	Golongan IX	27	28	55
4	Golongan VIII	-	-	-
5	Golongan VII	4	2	6
6	Golongan VI	-	-	-
7	Golongan V	18	4	22
Jumlah		**49**	**34**	**83**

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Selain berdasarkan tingkat Pendidikan dan pangkat golongan, komposisi pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Semarang dapat dikualifikasikan berdasarkan jabatan eselon, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
di Sekretariat Daerah Tahun 2025 (Per Mei 2025)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II.b	3	-	3
2	Eselon III.a	6	5	11
3	Eselon III.b	-	-	-
4	Eselon IV.a	2	9	11
5	Eselon IV.b	-	-	-
6	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	29	52	81
7	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	91	74	165
Jumlah		**131**	**140**	**271**

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

2.1.2.1.1 Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kota Semarang. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Semarang berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, dan peralatan serta perlengkapan kerja. Selain itu, Sekretariat Daerah Kota Semarang memiliki asset berupa tanah serta gedung dan bangunan. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah
Sarana Transportasi		
1	Bus	8
2	Kendaraan Roda 4	148
3	Kendaraan Roda 2	279
Sarana Telekomunikasi		
1	Telepon	172
2	Faximile	12
Peralatan dan Perlengkapan Kerja		
1	Komputer/Laptop	558
2	Meja	505
3	LCD Proyektor dan Layar	90
4	Kursi	2413
5	Almari Arsip/*Filling Cabinet*	465
6	Kamera dan *Handycam*	88
7	Printer	237
8	Mesin Fotokopi	14
9	TV/LCD	87
10	Tanah	5
11	Bangunan	35
12	Server	12
13	AC	177
14	Sepeda	22

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Tabel 2.5.

Aset Tanah

Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Nama Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.008	2004	Jl. Abdulrahman Saleh, Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	Hak Pakai	16/05/2001	HP 57	Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Pembelian	3.053.000	Untuk Rumah Dinas Wakil Wali Kota
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	18.139	2009	Jl. Abdulrahman Saleh, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	Hak Pakai	14/11/2005	HP 6	Rumah Dinas Wali Kota	Pembelian	24.131.000	Untuk Rumah Dinas Wali Kota
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.336	2004	Jl. Pemuda No.175 Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah	Hak Pakai	02/01/2004	HP 19	Gedung Pandanaran	Pembelian	19.015.200	Untuk Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	32.348	2009	Jl. Pemuda No.148 Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah	Hak Pakai	05/04/2011	HP 29	Kompleks Kantor Balai Kota Semarang	Pembelian	155.182.500	Kantor Balai Kota Semarang

No	Nama Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.604	2010	Jl. Pemuda No.163 Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah	Hak Pakai	18/02/1999	HP 16	Gedung Juang 45	Pembelian	15.270.000	Untuk Gedung Juang 45 (Hasil Penilaian 2010)

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Tabel 2.6.
Gedung dan Bangunan
Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai (m²)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Ribuan)
1	Garasi dan Generator Set - Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Baik	180	Jl Abdulrahman Saleh, Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	180	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	99.500
2	Pos Jaga - Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Baik	180	Jl Abdulrahman Saleh, Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	180	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	24.400
3	Rumah Dinas Utama - Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Baik	355	Jl Abdulrahman Saleh, Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	355	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	1.146.533
4	Bangunan Ajudan - Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Baik	150	Jl Abdulrahman Saleh, Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	150	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	50.300
5	Pos Jaga - Rumah Dinas Wali Kota	Baik	180	Jl.Rorojonggrang No.1, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	180	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	46.700
6	Rumah Tinggal 3 - Rumah Dinas Wali Kota	Baik	895	Jl.Rorojonggrang No.1, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	895	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	2.038.462

No	Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Ribuan)
7	Mushola dan Kamar tidur - Rumah Dinas Wali Kota	Baik	105	Jl.Rorojonggrang No.1, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	105	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	181.500
8	Bangunan ganti dan Ruang Tunggu - Rumah Dinas Wali Kota	Baik	150	Jl.Rorojonggrang No.1, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	150	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	34.300
9	Rumah Tinggal Ajudan dan Garasi - Rumah Dinas Wali Kota	Baik	202	Jl.Rorojonggrang No.1, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	202	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	478.600
10	Rumah Tinggal I - Rumah Dinas Wali Kota	Baik	100	Jl.Rorojonggrang No.1, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	100	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	2.485.991
11	Pendopo - Rumah Dinas Wali Kota	Baik	825	Jl.Rorojonggrang No.1, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	825	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	1.805.500
12	Bangunan Generator set - Rumah Dinas Wali Kota	Baik	180	Jl.Rorojonggrang No.1, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	180	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	27.200
13	Taman Vertikal Samping BPD 183m2 Taman Vertikal Samping DP Mall 330m2 Instalasi Penyiraman dan Saluran Lingkungan Balaikota	Baik	513	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	513	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	1.726.345

No	Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Ribuan)
14	Gedung Parkir, Kantin Balaikota Semarang, dan Kantor Inspektorat	Baik	3167	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	3167	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	63.086.711
15	Taman Depan Kominfo	Baik	197,4	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	197,4	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	398.423
16	Jalan Balaikota (Paving) 4.381,2 m2 Pedestrian Lingkungan Balaikota 1.112,8 m2	Baik	5494	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	5494	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	2.744.984
17	Kantin Belakang Dinas Kominfo	Baik	172,31	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	172,31	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	339.359
18	Gedung D - Dinas Sosial	Baik	848	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	848	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	1.788.471
19	Gedung C - BPKAD	Baik	3125	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	3125	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	6.950.136
20	Gedung Kantor Walikota	Baik	2506	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	2506	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	33.415.090
21	Gedung B - Kantor Dinas Tata Ruang dan Dinas Permukiman	Baik	3121	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	3121	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	16.756.851

No	Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Ribuan)
22	Gedung Pompa dan AC Central Balaikota	Baik	200	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	200	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	168.000
23	Gedung Genset Balaikota	Baik	100	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	100	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	108.000
24	Gedung Moch Ichsan	Baik	13219	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	13219	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	46.722.066
25	Gedung Masjid Balaikota	Baik	150	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	150	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	1.499.035
26	Gedung PIP/BRIN	Baik	893	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	893	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	2.616.313
27	Gedung E - Dinas Kominfo	Baik	1825	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	1825	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	4.532.040
28	Gedung Kantor Sekretaris Daerah	Baik	577	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	577	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	1.159.716
29	Bangunan Pagar dan Gapura Kompleks Balaikota	Baik	290,618	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	290,618	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	1.347.993

No	Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Ribuan)
30	Taman Depan gedung B,C dan D (Depan Distaru & BPKAD)	Baik	119	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	119	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	1.697.680
31	Gedung Pandanaran	Baik	5591	Jl. Pemuda No.175, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	5591	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	15.373.998
32	Bak Tandon Lantai 9 Gedung Pandanaran	Baik	155	Jl. Pemuda No.175, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132	155	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	98.976
33	Gedung Juang 45	Baik	4536	Jl.Pemuda 163, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132	4536	Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	7.819.260
34	Gedung PKK	Baik	1048	Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah	1048	Tanah Milik Kodim	-	2.348.842
35	Mushola Gedung PKK	Baik	4125	Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah	4125	Tanah Milik Kodim	-	88.339

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Sekretariat Daerah Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrastif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sehingga Sekretariat Daerah Kota Semarang memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pada urusan pemerintahan unsur pendukung. Selanjutnya, pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

2.1.3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan penunjang yang disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Indikator Tujuan :**																
a	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,00	71,00	72,00	74,00	76,00	69,78	71,03	72,68	72,68	84,14	99,68%	100,04%	100,94%	98,21%	110,7%
b	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00	87,00	87,50	88,00	88,35	86,68	87,35	91,02	91,02	90,59	101,97%	100,4%	104,02%	103,43%	102,53%
c	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	>70/BB	>70/BB	>72/BB	>74/BB	>76/BB	68,52	69,44	71,32	71,32	73,12	97,88%	99,2%	99,05%	96,38%	96,21%
d	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	NA	3,44/ST	3,45/ST	3,46/ST	3,47/ST	NA	3,43	3,53	3,53	3,53	NA	99,71%	102,32%	102,02%	101,73%
2	**Indikator Sasaran :**																
a	Persentase kecamatan dakelurahan berkinerja baik	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
b	Persentase dokumen Kerjasama (MoU, Lol, Perjanjian	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Kesepakatan) yang ditetapkan																
c	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
d	Persentase produk hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota) yang ditetapkan	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
e	Persentase produk hukum penetapan (Keputusan Wali Kota dan Keputusan Sekda) yang ditetapkan	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
f	Persentase warga miskin dan OPD yang diberikan bantuan hukum	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
g	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
h	Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Milik Daerah (BUMD)																
i	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
j	Persentase tempat peribadatan, Pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
k	Persentase kegiatan keagamaan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
l	Indeks Tata Kelola PBJ	Nilai / Predikat	NA	NA	NA	50,00	70,00	NA	NA	NA	73,1	89,50	NA	NA	NA	146,2 %	127,85 %
m	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
n	Persentase peliputan program dan kegiatan Kepala Daerah	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
o	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Daerah dan Staf Ahli Wali Kota yang terlayani																
p	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
q	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
r	Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
s	Persentase penyediaan sarana prasarana kantor	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
t	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
3	**Indikator Program :**																
a	Indek Pelayanan Publik	Nilai	NA	4,53	4,56	4,48	4,43	NA	4,53	4,56	4,48	4,43	NA	100%	100%	100%	100%
b	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di wilayah	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
c	Fasilitasi, Kerjasama serta	Persentase	NA	20%	20%	40%	60%	NA	20%	30%	35%	60%	NA	100%	150%	87,5%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	hubungan antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan kepala daerah																
d	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Kegiatan	NA	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	NA	9 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	8 Kegiatan	NA	100%	77,78 %	77,78 %	88,89 %
e	Persentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan local daerah	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
f	Pengendalian pelaksanaan Pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
g	Pengendalian pelaksanaan Pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
h	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	Dokumen	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
i	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
j	Perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	Persentase	NA	100%	NA	40%	100%	NA	100%	NA	40%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
k	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	OPD	NA	NA	39 OPD	41 OPD	43 OPD	NA	NA	23 OPD	41 OPD	50 OPD	NA	NA	58,97 %	100%	116,28 %
l	Prsentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persentase / dokumen	NA	NA	100%	100%	5 Dokumen	NA	NA	100%	100%	5 Dokumen	NA	NA	100%	100%	100%
m	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebihajan dan kegiatan kepala daerah melalui media cetak, online dan eklektronik	Persentase	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%
n	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	NA	100%	NA	100%	100%	NA	100%	NA	100%	100%	NA	100%	NA	100%	100%
o	Persentase perencanaan dan	Persentase	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	pelaporan kinerja Bagian Tata Usaha																
p	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran bagi Bagian Tata Usaha	Persentase	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%
q	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan di Bagian Tata Usaha	Persentase	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%
r	Persentase peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata usaha	Persentase	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat Daerah Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditunjukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Tabel 2.8.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NA**	**NA**	**136.576.771.640**	**157.404.524.319**	**143.496.993.052**	**NA**	**NA**	**116.730.396.847**	**137.331.332.797**	**123.765.658.174**	**NA**	**NA**	**85,47%**	**87,25 %**	**86,25 %**
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	9.229.880	16.833.180	58.026.250	NA	NA	7.178.500	15.247.500	50.966.270	NA	NA	77,77%	90,58 %	87,83 %
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	9.229.880	4.450.000	43.689.850	NA	NA	7.178.500	4.079.000	37.368.950	NA	NA	77,77%	91,66 %	85,53 %
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA	-	3.268.000	3.658.900	NA	NA	-	2.860.000	3.407.100	NA	NA	0,00%	87,52 %	93,12 %
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA	-	3.905.910	4.258.900	NA	NA	-	3.753.000	3.886.620	NA	NA	0,00%	96,09 %	91,26 %
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	NA	NA	-	2.363.680	2.969.300	NA	NA	-	1.996.500	2.894.280	NA	NA	0,00%	84,47 %	97,47 %
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	NA	NA	-	2.845.590	3.449.300	NA	NA	-	2.559.000	3.409.320	NA	NA	0,00%	89,93 %	98,84 %
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NA	NA	31.348.155.654	30.760.857.536	34.725.129.777	NA	NA	29.713.008.997	29.457.978.945	33.394.918.953	NA	NA	94,78%	95,76 %	96,17 %
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	30.489.675.222	29.876.343.136	33.829.838.377	NA	NA	28.875.422.497	28.652.091.705	32.504.915.053	NA	NA	94,71%	95,90 %	96,08 %

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	856.200.000	881.400.000	891.820.000	NA	NA	836.260.000	803.210.000	887.140.000	NA	NA	97,67%	91,13%	99,48%
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	NA	542.960	695.200	785.800	NA	NA	272.500	599.140	688.000	NA	NA	50,19%	86,18%	87,55%
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	NA	NA	1.737.472	2.419.200	2.685.600	NA	NA	1.054.000	2.078.100	2.175.900	NA	NA	60,66%	85,90%	81,02%
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	NA	NA	273.702.751	1.622.531.691	1.248.958.389	NA	NA	263.923.382	1.389.273.371	922.010.643	NA	NA	96,43%	85,62%	73,82%
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	NA	NA	45.540.033	44.814.152	83.258.389	NA	NA	43.177.272	44.566.341	77.744.850	NA	NA	94,81%	99,45%	93,38%
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	NA	228.162.718	1.577.717.539	1.165.700.000	NA	NA	220.746.110	1.344.707.030	844.265.793	NA	NA	96,75%	85,23%	72,43%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NA	NA	127.973.387	3.490.648.746	491.761.406	NA	NA	119.200.000	3.440.902.183	437.915.226	NA	NA	93,14%	98,57%	89,05%
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	NA	NA	127.973.387	3.319.612.746	297.688.290	NA	NA	119.200.000	3.284.324.108	254.560.000	NA	NA	93,14%	98,94%	85,51%
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	-	-	194.073.116	NA	NA	-	-	183.355.226	NA	NA	0,00%	0,00%	94,48%
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	NA	171.036.000	NA	NA	NA	NA	156.578.075	NA	NA	NA			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	NA	NA	35.269.767.020	31.593.824.789	25.673.586.673	NA	NA	23.699.950.117	21.924.991.446	17.524.234.073	NA	NA	67,20%	69,40%	68,26%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	NA	NA	426.827.711			NA	NA	421.498.750			NA	NA			
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	1.269.697.759	888.869.770	858.142.061	NA	NA	1.021.108.000	722.286.400	700.042.280	NA	NA	80,42%	81,26%	81,58%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	NA	NA	1.189.484.819	952.528.533	696.133.833	NA	NA	1.139.551.066	827.757.023	567.309.425	NA	NA	95,80%	86,90%	81,49%
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	NA	NA	500.010.804	556.533.457	734.854.859	NA	NA	380.199.000	467.767.400	656.666.183	NA	NA	76,04%	84,05%	89,36%
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	338.040.000	327.480.000		NA	NA	296.216.000	292.553.000		NA	NA	87,63%		
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	11.898.539.600	9.961.119.600	9.526.550.000	NA	NA	11.087.112.072	8.087.268.067	6.597.159.211	NA	NA	93,18%	81,19%	69,25%
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	18.101.295.181	16.232.817.908	12.151.091.112	NA	NA	8.032.052.229	9.014.226.556	7.448.481.974	NA	NA	44,37%	55,53%	61,30%
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	NA	1.545.871.146	2.674.475.521	1.706.814.808	NA	NA	1.322.213.000	2.513.133.000	1.554.575.000	NA	NA	85,53%	93,97%	91,08%
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	18.821.825.185	22.504.841.791	6.439.148.681	NA	NA	16.096.121.278	21.130.577.615	5.901.774.353	NA	NA	85,52%	93,89%	91,65%
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	NA	NA	-	2.200.000.000	-	NA	NA	-	1.836.563.390	-	NA	NA	#DIV/0!	83,48%	#DIV/0!

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	NA	14.261.029.103	12.222.387.710	4.184.671.129	NA	NA	11.911.109.000	11.688.702.154	3.987.992.900	NA	NA	83,52%	95,63%	95,30%
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	NA	NA	356.332.727	329.166.057	619.180.812	NA	NA	289.034.750	287.306.000	563.600.000	NA	NA	81,11%	87,28%	91,02%
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	231.218.621	6.969.823.280	1.571.947.553	NA	NA	207.412.000	6.577.564.000	1.287.701.440	NA	NA	89,70%	94,37%	81,92%
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	NA	3.973.244.734	783.464.744	63.349.187	NA	NA	3.688.565.528	740.442.071	62.480.013	NA	NA	92,84%	94,51%	98,63%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA	11.549.304.788	13.273.389.593	12.723.196.976	NA	NA	10.394.998.051	11.203.250.959	11.172.409.514	NA	NA	90,01%	84,40%	87,81%
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	NA	162.993.800	163.006.000	163.215.000	NA	NA	145.531.626	157.785.376	162.598.900	NA	NA	89,29%	96,80%	99,62%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	8.313.213.223	9.640.302.132	9.030.219.632	NA	NA	7.900.599.560	8.566.268.107	8.181.175.893	NA	NA	95,04%	88,86%	90,60%
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	1.497.500.000	1.555.832.760	1.648.218.821	NA	NA	860.541.472	842.962.294	1.152.702.823	NA	NA	57,47%	54,18%	69,94%
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	1.575.597.765	1.914.248.701	1.881.543.523	NA	NA	1.488.325.393	1.636.235.182	1.675.931.898	NA	NA	94,46%	85,48%	89,07%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA	17.377.050.333	24.405.527.243	28.007.259.828	NA	NA	16.456.130.929	23.060.921.934	24.504.037.633	NA	NA	94,70%	94,49%	87,49%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	NA	NA	167.599.960	169.123.596	167.432.400	NA	NA	107.250.383	89.768.729	40.659.287	NA	NA	63,99%	53,08%	24,28%
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	NA	3.033.831.511	3.311.041.512	3.312.732.708	NA	NA	2.728.556.676	2.934.877.829	2.539.565.375	NA	NA	89,94%	88,64%	76,66%
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	NA	NA	119.988.000	121.078.800	181.618.200	NA	NA	64.799.500	97.857.400	121.269.150	NA	NA	54,00%	80,82%	66,77%
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	11.156.933.463	16.598.078.143	19.847.606.841	NA	NA	10.824.490.809	16.348.094.747	18.088.983.400	NA	NA	97,02%	98,49%	91,14%
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	NA	1.958.561.265	2.964.960.427	3.448.514.837	NA	NA	1.837.528.250	2.538.015.731	2.850.919.800	NA	NA	93,82%	85,60%	82,67%
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	NA	940.136.134	1.241.244.765	1.049.354.842	NA	NA	893.505.311	1.052.307.498	862.640.621	NA	NA	95,04%	84,78%	82,21%
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	NA	NA	4.132.151.632	4.761.945.398	5.197.437.354	NA	NA	3.733.405.296	2.967.904.293	2.774.415.795	NA	NA	90,35%	62,33%	53,38%
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	NA	NA	182.400.632	92.621.598	94.374.554	NA	NA	159.257.015	90.878.906	91.984.420	NA	NA	87,31%	98,12%	97,47%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	NA	NA	850.000.000	850.336.800	850.336.800	NA	NA	828.498.281	625.025.387	530.431.375	NA	NA	97,47%	73,50 %	62,38 %
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	NA	NA	3.099.751.000	3.818.987.000	4.252.726.000	NA	NA	2.745.650.000	2.252.000.000	2.152.000.000	NA	NA	88,58%	58,97 %	50,60 %
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	NA	NA	3.955.000.000	3.955.000.000	2.638.600.000	NA	NA	3.477.717.890	2.492.685.651	2.587.202.651	NA	NA	87,93%	63,03 %	98,05 %
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	NA	NA	2.575.000.000	2.575.000.000	2.575.000.000	NA	NA	2.151.136.514	2.370.770.000	2.574.985.000	NA	NA	83,54%	92,07 %	100,00%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	NA	NA	1.380.000.000	1.380.000.000	63.600.000	NA	NA	1.326.581.376	121.915.651	12.217.651	NA	NA	96,13%	8,83%	19,21 %
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	NA	NA	1.004.544.010	3.946.273.908	3.523.190.099	NA	NA	817.835.033	3.720.098.675	3.223.744.567	NA	NA	81,41%	94,27 %	91,50 %
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	NA	NA	280.149.258	383.923.287	325.443.876	NA	NA	186.432.471	333.296.764	265.936.699	NA	NA	66,55%	86,81 %	81,72 %
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	NA	NA	363.642.676	2.717.672.300	2.282.599.318	NA	NA	333.462.516	2.596.757.920	2.109.687.193	NA	NA	91,70%	95,55 %	92,42 %
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	NA	NA	161.912.066	524.790.720	504.919.224	NA	NA	114.216.500	494.726.617	493.505.679	NA	NA	70,54%	94,27 %	97,74 %
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	NA	NA	198.840.010	319.887.601	410.227.681	NA	NA	183.723.546	295.317.374	354.614.996	NA	NA	92,40%	92,32 %	86,44 %
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	NA	NA	12.708.067.000	17.072.850.444	22.770.697.619	NA	NA	11.950.927.374	16.527.500.225	21.272.028.496	NA	NA	94,04%	96,81 %	93,42 %

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	NA	NA	1.176.880.000	1.322.059.286	1.432.518.575	NA	NA	1.082.471.616	1.280.375.365	1.421.838.849	NA	NA	91,98%	96,85%	99,25%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	NA	NA	7.990.350.000	11.778.048.924	14.115.340.674	NA	NA	7.380.915.328	11.416.156.420	13.876.890.654	NA	NA	92,37%	96,93%	98,31%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	NA	NA	3.540.837.000	3.972.742.234	7.222.838.370	NA	NA	3.487.540.430	3.830.968.440	5.973.298.993	NA	NA	98,49%	96,43%	82,70%
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**NA**	**NA**	**47.533.836.101**	**61.156.733.830**	**67.800.366.209**	**NA**	**NA**	**44.388.487.301**	**56.578.856.288**	**61.383.305.798**	**NA**	**NA**	**93,38%**	**92,51%**	**90,54%**
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	NA	NA	1.217.197.300	3.105.111.458	5.004.603.471	NA	NA	1.089.287.362	2.638.031.389	4.715.244.309	NA	NA	89,49%	84,96%	94,22%
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	NA	NA	306.452.500	630.166.266	406.240.016	NA	NA	279.616.000	397.069.380	388.428.500	NA	NA	91,24%	63,01%	95,62%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	NA	NA	186.433.600	855.845.005	554.197.840	NA	NA	102.310.500	649.666.050	529.569.419	NA	NA	54,88%	75,91%	95,56%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	NA	NA	724.311.200	1.619.100.187	4.044.165.615	NA	NA	707.360.862	1.591.295.959	3.797.246.390	NA	NA	97,66%	98,28%	93,89%
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	NA	NA	40.183.422.264	44.134.268.220	50.394.505.574	NA	NA	39.308.429.310	42.625.029.642	48.388.033.907	NA	NA	97,82%	96,58%	96,02%
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	NA	NA	32.214.600.566	36.415.110.644	39.269.862.092	NA	NA	31.718.803.456	35.211.280.420	37.568.631.068	NA	NA	98,46%	96,69%	95,67%
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	NA	NA	7.028.085.794	6.875.453.478	10.552.987.162	NA	NA	6.829.828.532	6.702.065.861	10.418.560.052	NA	NA	97,18%	97,48%	98,73%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	NA	NA	940.735.904	843.704.098	571.656.320	NA	NA	759.797.322	711.683.361	400.842.787	NA	NA	80,77%	84,35 %	70,12 %
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	NA	NA	3.090.186.530	7.527.560.639	6.856.095.525	NA	NA	1.957.485.849	6.656.068.604	4.842.281.878	NA	NA	63,35%	88,42 %	70,63 %
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	NA	NA	869.647.800	675.313.770	559.245.344	NA	NA	625.847.321	582.325.830	470.075.390	NA	NA	71,97%	86,23 %	84,06 %
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	NA	NA	1.445.819.465	1.896.512.869	1.788.132.411	NA	NA	682.480.544	1.355.996.556	1.061.381.311	NA	NA	47,20%	71,50 %	59,36 %
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	NA	NA	774.719.265	4.955.734.000	4.508.717.770	NA	NA	649.157.984	4.717.746.218	3.310.825.177	NA	NA	83,79%	95,20 %	73,43 %
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	NA	NA	3.043.030.007	6.389.793.513	5.545.161.639	NA	NA	2.033.284.780	4.659.726.653	3.437.745.704	NA	NA	66,82%	72,92 %	62,00 %
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	NA	NA	983.298.283	1.329.767.601	1.706.153.623	NA	NA	912.756.787	1.107.827.114	1.286.782.259	NA	NA	92,83%	83,31 %	75,42 %
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	NA	NA	2.059.731.724	5.060.025.912	3.839.008.016	NA	NA	1.120.527.993	3.551.899.539	2.150.963.445	NA	NA	54,40%	70,20 %	56,03 %
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**NA**	**NA**	**4.130.255.572**	**6.928.747.353**	**10.341.613.412**	**NA**	**NA**	**3.744.279.566**	**5.910.264.562**	**8.785.757.727**	**NA**	**NA**	**90,65%**	**85,30 %**	**84,96 %**
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	NA	NA	1.383.538.160	3.165.643.200	6.195.572.098	NA	NA	1.307.020.050	2.894.934.260	5.411.957.806	NA	NA	94,47%	91,45 %	87,35 %
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	NA	NA	680.020.277	420.055.277	1.056.191.197	NA	NA	651.075.272	389.917.094	1.019.122.097	NA	NA	95,74%	92,83 %	96,49 %

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	NA	NA	279.606.958	710.568.798	931.226.678	NA	NA	259.862.234	645.503.034	744.484.637	NA	NA	92,94%	90,84%	79,95%
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	NA	NA	423.910.925	2.035.019.125	4.208.154.223	NA	NA	396.082.544	1.859.514.132	3.648.351.072	NA	NA	93,44%	91,38%	86,70%
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	NA	NA	669.865.400	873.053.174	852.676.610	NA	NA	620.581.664	779.377.088	723.100.335	NA	NA	92,64%	89,27%	84,80%
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	NA	NA	148.929.852	180.837.200	236.129.860	NA	NA	143.612.270	169.561.126	216.482.000	NA	NA	96,43%	93,76%	91,68%
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	NA	NA	399.457.022	515.503.304	492.638.360	NA	NA	360.674.850	461.515.500	393.343.171	NA	NA	90,29%	89,53%	79,84%
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	NA	NA	121.478.526	176.712.670	123.908.390	NA	NA	116.294.544	148.300.462	113.275.164	NA	NA	95,73%	83,92%	91,42%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	NA	NA	1.732.710.907	2.243.665.309	2.865.321.292	NA	NA	1.531.775.052	1.718.270.384	2.314.072.386	NA	NA	88,40%	76,58%	80,76%
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	NA	NA	665.262.493	1.326.670.140	1.514.684.940	NA	NA	567.726.588	943.370.328	1.251.246.289	NA	NA	85,34%	71,11%	82,61%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	NA	NA	462.758.414	367.400.832	600.766.352	NA	NA	411.881.464	328.603.606	513.543.974	NA	NA	89,01%	89,44%	85,48%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	NA	NA	604.690.000	549.594.337	749.870.000	NA	NA	552.167.000	446.296.450	549.282.123	NA	NA	91,31%	81,20%	73,25%
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	NA	NA	344.141.105	646.385.670	428.043.412	NA	NA	284.902.800	517.682.830	336.627.200	NA	NA	82,79%	80,09%	78,64%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	NA	NA	344.141.105	646.385.670	428.043.412	NA	NA	284.902.800	517.682.830	336.627.200	NA	NA	82,79%	80,09 %	78,64 %
		NA	**NA**	**188.240.863.313**	**225.490.005.502**	**221.638.972.673**	**NA**	**NA**	**164.863.163.714**	**199.820.453.647**	**193.934.721.699**	**NA**				

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

2.1.3.3 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Pada bagian ini dijelaskan kelompok sasaran pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang dalam pencapaian tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Kota Semarang memiliki beberapa kelompok sasaran pelayanan, yaitu:

i. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang
   - Layanan yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada OPD berupa fasilitasi sistem pengadaan elektronik, baik yang dilakukan secara tender, e-tender, e-PL, e-Purchasing, dsb. Selain layanan tersebut, BPBJ juga berperan dalam penyediaan data terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
   - Bagian Administrasi Pembangunan menyusun dan menyediakan Dokumen Peraturan Wali Kota Tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi acuan OPD di Kota Semarang dalam menyusun anggaran terkait Pembangunan fisik, serta mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Wali Kota tersebut kepada seluruh OPD Kota Semarang. Selain itu, Bagian Administrasi Pembangunan mengadakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rakor TEPRA) di tiap bulannya sebagai wadah OPD menyampaikan hasil laporan pekerjannya kepada wali kota.
   - Bagian Tata Usaha memberikan pelayanan persuratan bagi OPD Kota Semarang, termasuk Sekretariat Daerah Kota Semarang sendiri. Selain itu OPD Kota Semarang yang kehabisan atau tidak memiliki anggaran jamuan rapat dan jamuan tamu dapat mengajukan permohonan bantuan jamuan rapat dan jamuan tamu ke Bagian Tata Usaha.
   - Bagian Rumah Tangga memberikan pelayanan kepada OPD Kota Semarang berupa peminjaman Gedung atau ruangan yang digunakan untuk rapat atau kegiatan.
   - Bagian Hukum memberikan pendampingan kepada perangkat daerah yang terkena kasus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu Bagian Hukum memfasilitasi OPD dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi Perancangan Produk Hukum Pengaturan, Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Perancangan Produk Hukum Penetapan.
   - Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah memfasilitasi OPD dalam penyusunan Kerjasama dalam negeri dan Kerjasama luar negeri.
   - Bagian Organisasi memfasilitasi kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah dan ketatalaksanaan, selain itu Bagian Organisasi juga memfasilitasi kegiatan pelayanan publik bagi OPD serta memfasilitasi kegiatan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi OPD.

ii. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   - Bagian Tata Usaha menyediakan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, Bagian Tata Usaha juga memfasilitasi perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menyediakan jamuan rapat dan jamuan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bagian Rumah Tangga menyediakan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, Bagian Rumah Tangga juga menyediakan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menyediakan kendaraan dinas untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bagian Komunikasi Pimpinsn dan Protokol memberikan layanan keprotokolan, dokumentasi dan publikasi kebijakan serta kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bagian Keuangan menyediakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

iii. Pegawai Sekretariat Daerah
- Bagian Rumah Tangga menyediakan pengadaan pakaian dinas beserta atribut untuk seluruh pegawai Sekretariat Daerah. Selain itu, Bagian Rumah Tangga memfasilitasi kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk pejabat eselon di Sekretariat Daerah dan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk pegawai Sekretariat Daerah yang membutuhkan.
- Bagian Keuangan menyediakan gaji dan tunjangan seluruh ASN di lingkup Sekretariat Daerah.

iv. Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
- Bagian Tata Pemerintahan memfasilitasi administrasi pelayanan pada perangan kecamatan dan kelurahan serta melakukan evaluasi atas kinerja perangkat kecamatan dan kelurahan.

v. Masyarakat
- Kelompok sasaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Masyarakat pada umumnya dan Lembaga-lembaga keagamaan pada khususnya. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama 2021-2024 adalah fasilitasi kegiatan hari besar agama, fasilitasi haji dan kegiatan-kegiatan keagamaan lain. Selain itu beberapa lembaga-lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan juga memperoleh hibah uang guna kelancaran operasional lembaga seperti LPTQ, Baznas, dan PMI.
- Bagian Hukum memberikan bantuan hukum kepada warga miskin di Kota Semarang yang terkena kasus hukum.

vi. Penyedia Barang/Jasa
- Layanan yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada penyedia barang/jasa berupa layanan pembuatan akun, layanan kendala penggunaan LPSE, SiKAP, SiRUP, E-Katalog, pendampingan penggunaan semua aplikasi yang terkait dengan LPSE, upload produk, dan proses transaksi. Layanan ini dilakukan setiap hari mulai pukul 08.30 – 14.00 WIB.

2.1.3.4 Mitra Sekretariat Daerah Kota Semarang Dalam Pemberian Pelayanan

Pada bagian ini dijelaskan mitra Sekretariat Daerah Kota Semarang dalam pencapaian tugas dan fungsinya. Hasil interprestasi ini ditunjukan untuk menggambarkan proses bisnis Sekretariat Daerah Kota Semrang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Semarang menjalin kerja sama dengan beberapa *stakeholder* dan pihak terkait dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan kelompok sasaran pelayanan lainnya, antara lain sebagai berikut:

i. Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai beberapa kegiatan yang melibatkan stakeholder diluar pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, instansi vertikal dan pihak swasta, antara lain:
   (a) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah
- Kejaksaan Negeri Kota Semarang
- Kepolisian Resor Kota Besar Kota Semarang
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang
- Perum Bulog Sub Divre 1 Semarang
- PT Pertamina MOR IV Wilayah Jateng-DIY

(b) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
- Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengan dan DIY
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah
- Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah I
- BPJS Kesehatan Kota Semarang
- BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang
- PT Taspen (Persero) KCU Kota Semarang

(c) Program Corporate Social Responsibility (CSR)
- BUMN yang beroperasi di Kota Semarang
- BUMD Kota Semarang
- Perusahaan Swasta
- Perguruan Tinggi
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Lainnya

(d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda)
- Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
- PT. BPR Bank Kota Semarang
- PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda)
- PT. Bank Jateng
- PT. BPR BKK Kota Semarang

(e) Pengembangan Kerajinan Daerah
- KADIN Kota Semarang
- Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI)
- Indonesian Fashion Chamber Semarang Chapter
- Woman Preneur Community Semarang

(f) Mitra Lainnya
- Akademisi

ii. Bagian Administrasi Pembangunan bermitra dengan beberapa konsultan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:
- CV. Raska Utama Konsultan di tahun 2024 untuk kegiatan Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Kota Semarang Tahun 2025.
- Perusahaan Perorangan a.n. Kurnia Adi Setiawan, S.Kom. di tahun 2024 untuk kegiatan pengembangan website Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fisik dan Keuangan di Kota Semarang.
- CV. Authentic di tahun 2024 untuk kegiatan Penyusunan Pra Ranwal Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang dan Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Evaluasi Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

iii. Bagian Tata Pemerintahan bermitra dengan beberapa konsultan dan instansi vertikal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:
- CV. Djawa Karya Konsultan di tahun 2023 untuk paket kegiatan Jasa Pembuatan Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan, dimana kegiatan tersebut mendukung pendataan dan pemetaan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

- CV.TUNAS di tahun 2024 untuk paket kegiatan Survei Pemerintahan, dimana kegiatan tersebut berupa pengumpulan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintahan.
- Kodim 0733/Kota Semarang untuk kegiatan fasilitasi stabilitas wilayah di Kota Semarang.
- Polrestabes Kota Semarang untuk kegiatan fasilitasi stabilitas wilayah di Kota Semarang.

2.1.3.5 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Semarang

Dukungan yang dapat dilakukan oleh BUMD Kota Semarang dalam rangka pencapaian kinerja Perangkat Daerah yaitu dengan pencapaian target pendapatan serta laba yang maksimal, sehingga investasi Pemerintah Kota Semarang yang telah diberikan kepada BUMD mendapatkan imbal balik yang maksimal. Pelayanan prima yang diberikan BUMD Kota Semarang kepada Masyarakat tentunya juga dapat memberikan efek positif terhadap kinerja Perangkat Daerah.

2.1.3.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah Kota Semarang

Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah memfasilitasi OPD di Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Pada tahun 2023 memfasilitasi 28 kerjasama dalam negeri antara Pemerintah Kota Semarang dengan pihak lainnya, antara lain:

- Kesepakatan Bersama PT. Kompas Media Nusantara tentang Penyelenggaraan Kegiatan Semarang 10K;
- Nota Kesepakatan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan
- Perjanjian Kerja Sama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 tentang Pinjam Pakai Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas.

Di tahun 2024, Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah memfasilitasi 25 kerjasama dalam negeri antara Pemerintah Kota Semrang dengan pihak lainnya, antara lain:

- PKS antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang dengan Pemerintah Kota Semrang tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik serta Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum Milik Pemerintah Kota Semarang;
- Kesepakatan Bersama antara PT. Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. dan Pemerintah Kota Semarang tentang Pembangunan Patung Wayang “Srikandi” di Media Jalan Pahlawan Kota Semarang; dan
- Nota Kesepakatan antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang tentang Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kota Semarang.

Selain kerjasama dalam negeri, Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah juga memfasilitasi kerjasama luar negeri antara Pemerintah Kota Semarang dengan pihak lainnya di luar neger. Di tahun 2023, Bagian Kerjasama dan

Otonomi Daerah memfasilitasi 5 kerjasama luar negeri antara Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri, seperti:

- MoU antara Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia, dan Pemerintah Kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama Kota Bersaudara;
- *Letter of Intent* Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan *Platform* Keamanan Kota Cerdas Berbasis *Artificial Intelligent Vision* di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
- *Letter of Intent* tentang Surat Peminatan proyek Evaluasi Percontohan *"Smart Water Cities"* antara Pemerintah Kota Semarang dan Perusahaan Korea *Water Resources* dan *Asia Water Council* dan *International Water Resources Association*;
- *Agreement between Vitens Evides International B.V and* PDAM Tirto Moedal Kota Semarang *Regarding the Waterworx Project: Moving Together towards Resilient Water Supply for Semarang*; dan
- Rencana Kerja Tahunan antara *Childfun International* dan Pemerintah Kota Semarang Januari-Juni 2023.

Pada tahun 2024, Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah memfasilitasi 2 kerjasama luar negeri, yaitu:

- Letter of Intent antara Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia dan MarkAny Inc. Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi;
- Rencana Kerja Tahunan antara *Childfund International* dan Pemerintah Kota Semarang Januari 2024-Desember 2024.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, antara lain:

- Tantangan
  Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai berikut:
  i) Globalisasi yang mempengaruhi perilaku dan tatanan sosial budaya masyarakat.
  ii) Kebutuhan akan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan meningkatkan keberdayaan aparatur dalam mewujudkan peningkat akuntabilitas kinerja.
  iii) Pentingnya sistem manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas serta dapat dipertanggungjawabkan.
  iv) Diperlukan kejelasan akan pembagian kewenangan pemerintah daerah.
  v) Tingginya tuntutan Masyarakat terhadap pemahaman produk-produk hukum dan tersedianya produk hukum yang berkualitas serta mempunyai kepastian hukum dalam setiap tata Kelola pemerintahan.
  vi) Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudkan good governance.
  vii) Menguatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

viii) Lemahnya koordinasi baik sektoral maupun antar perangkat daerah.
ix) Tuntutan pengambil kebijakan serta penanganan permasalahan sosial secara tepat dan terintegrasi antar stakeholder yang terkait.
x) Tingginya tuntutan masyarakat dalam transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
xi) Tuntutan akan kecepatan informasi tentang kebijakan pimpinan daerah maupun informasi kegiatan Pemerintah Kota Semarang sehinggan dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
xii) Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

- Peluang

Sedangkan peluan bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pelayanannya adalah:

i) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui pembinaan.
ii) Adanya pranata dan peraturan tentang Pemerintah Daerah serta tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
iii) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
iv) Disusunnya Peraturan Wali Kota Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja pada masing-masing OPD, terutama untuk Sekretariat Daerah yaitu Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.
v) Tersedianya produk-produk hukum pusat dan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibutuhkan oleh OPD, serta melakukan sosialisasi produk-produk hukum yang ada kepada masyarakat Kota Semarang.
vi) Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang diterapkan dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, Reformasi Birokrasi, peningkatan partisipasi publik, dan pengukuran kinerja.
vii) Penggunaan sosial media dalam menyampaikan informasi pembangunan di Kota Semarang sehingga dapat sampai ke masyarakat.
viii) Tersedianya teknologi informasi yang memadai dalam mendukung pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal.
ix) Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, komunikasi yang efektif, serta pemahaman yang sama terhadap masalah dan solusi.
x) Pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan akses informasi publik, memperkuat system pengawasa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan.
xi) Kerja sama yang baik dengan media baik cetak maupun obline untuk kebutuhan pemberitaan dan penyebarluasan informasi kebijakan pimpinan daerah.
xii) Pemenuhan sarana prasarana yang didasarkan pada kebutuhan dan pencatatan asset secara berkala.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan tersebut, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Sekretariat Daerah Kota Semarang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang.

2.2.1 Permasalahan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Sekretrariat Daerah Kota Semarang, serta setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Sekretariat Daerah Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Semarang yaitu **"Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berdaya guna"** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.

Rumusan Permasalahan

Sekretariat Daerah Kota Semarang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya kualitas produk hukum yang dihasilkan.	Belum optimalnya pelaksanaan penetapan dan pengundangan Produk Hukum Daerah.
		Belum optimalnya pencapaian pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan Informasi Hukum.
		Belum optimalnya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan kepada warga Kota Semarang dan Perangkat Daerah.
2.	Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.	Belum optimalnya capaian kinerja administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan
		Belum optimalnya peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan administrasi kewilayahan
		Belum optimalnya peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
3.	Belum optimalnya tata kelola kinerja perangkat daerah.	Belum optimalnya peningkatan pengelolaan kelembagaan dan analisasi jabatan.
		Belum optimalnya peningkatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana.
		Belum optimalnya peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi.

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
4.	Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan peran pemerintah daerah pada kerangka otonomi.	Belum optimalnya peningkatan hasil kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Daerah lain dan pihak ketiga dalam negeri.
		Belum optimalnya peningkatan kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga di Luar Negeri.
5.	Belum optimalnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya ketersediaan dokumen pelaporan kinerja OPD sesuai peraturan perundang-undangan
6.	Belum optimalnya peningkatan ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah.	Belum optimalnya peningkatan fasilitasi penyusunan program pembangunan
		Belum optimalnya peningkatan pengendalian dan evaluasi program Pembangunan
		Belum optimalnya peningkatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
7.	Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja Sekretariat Daerah.	Belum optimalnya ketersediaan acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan
8.	Belum optimalnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan.	Belum optimalnya fasilitasi kegiatan pengelolaan bina mental spiritual
		Belum optimalnya fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial
		Belum optimalnya fasilitasi kegiatan kesejahteraan Masyarakat
9.	Belum optimalnya efisiensi, transparasi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa.	Belum optimalnya peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa
		Belum optimalnya peningkatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
		Belum optimalnya peningkatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
10.	Belum optimalnya kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel dan berbasis pada good governance.	Belum optimalnya pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan pada BUMD
11.	Belum optimalnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR.	Belum optimalnya pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program CSR
	Belum optimalnya efektivitas pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	Belum optimalnya pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan perekonomian berbasis potensi lokal unggulan
12.	Belum optimalnya kinerja keprotokolan, peliputan dan publikasi secara efektif.	Belum optimalnya layanan keprotokolan, dokumentasi dan publikasi kebijakan serta kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
		Belum optimalnya dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana
13.	Belum optimalnya kualitas kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah.	Belum optimalnya penggunaan dana penunjang dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Belum optimalnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah
		Belum optimalnya fasilitasi kunjungan tamu
		Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum
		Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Sekretariat Daerah
		Belum optimalnya pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah
		Belum optimalnya pemenuhan jasa pelayanan umum Sekretariat Daerah
14.	Belum optimalnya kualitas layanan rumah tangga Sekretariat Daerah.	Belum optimalnya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan
		Belum optimalnya pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Belum optimalnya pemenuhan pakaian dinas dan atribur kelengkapannya
		Belum optimalnya pemeliharaan kendaraan dinas dan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
		Belum optimalnya pemeliharaan mebel, dan gedung kantor dan bangunan lainnya
		Belum optimalnya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan
		Belum optimalnya kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Sekretariat Daerah
		Belum optimalnya ketersediaan kebutuhan jasa pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Belum optimalnya pemenuhan jasa pelayanan umum kantor
		Belum optimalnya pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya fasilitasi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan
15.	Belum optimalnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah.	Belum optimalnya ketersediaan dokumen administrasi keuangan Sekretariat Daerah
		Belum optimalnya pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah
		Belum optimalnya ketersediaan dokumen pelaporan keuangan Sekretariat Daerah
		Belum optimalnya ketersediaan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah
		Belum optimalnya pelaksanaan administrasi keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

2.2.2.1 Telaahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

I. Isu Strategis Global

Banyaknya isu strategis pada lingkup global dan regional menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaksanaan pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi Kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi baik di Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi daerah, tak terkecuali Kota Semarang. Beberapa isu global apabila direspon dengan baik akan menjadi faktor pendukung bagi percepatan pembangunan, namun sebaliknya akan menjadi faktor penghambat apabila pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya gagal menemukan strategi untuk merespon isu tersebut. Berikut merupakan isu pada lingkup global dan regional yang perlu dipertimbangkan bagi Pembangunan wilayah, terutama pada lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang, yaitu:

- Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan Masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptif masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini didorong agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Disrupsi teknologi akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan di masa depan, seperti cara kerja pemerintah yang dapat terdampak dengan adanya peluang baru dalam Pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata Kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya.

- Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada Tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara kedepan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Sementara itu, munculnya perubahan teknologi finansial seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan.

II. Isu Strategis Nasional

Beberapa focus Pembangunan nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Kemampuan *stakeholder* di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan.

Salah satu isu strategis nasional yang relevan dengan Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah pada Sekretariat Daerah adalah aspek penting dalam memastikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

III. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Selain isu global dan isu nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 juga menjadi perhatian agar kesinambungan pembangunan dapat selaras sampai dengan level kota. Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata Kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebegai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme kokreasi antaraktor dapat dioptimalkan. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya langkah transformatif dalam mewujudkan *collaborative governance*, juga pada proses untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik.

2.2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Visi Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang merupakan langkah penguatan fondasi transformasi dalam tahap pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045. Adapun visi Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang adalah **"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif".** Visi tersebut mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatnya persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi Pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Dari ketujuh misi di atas, misi yang paling sesuai dengan Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah misi 7, yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas. Sekretariat Daerah memiliki fungsi vital dalam mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam era digital dan urbanisasi yang berkembang pesat, pemerintah daerah melalui Sekretariat Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang prima, mewujudkan tata Kelola yang

bersih, bebas korupsi, dan responsif, serta bertransformasi ke arah *smart city*.

2.2.2.3 Telaahan Isu Strategis KLHS

KLHS menjadi dokumen terintegrasi dalam rencana Pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan Pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah serta relevan dengan Sekretariat Daerah adalah perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam mendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai koordinator administratif, Sekretariat Daerah memengaruhi kualitas pelayanan publik, efektivitas kebijakan, serta hubungan antar perangkat daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab di Sekretariat Daerah diperlukan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, mendorong demokratisasi pemerintahan daerah, menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi, dan mendukung capaian visi dan misi kepala daerah.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabilan tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang, perlu mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga diperlukan telaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; dan (7) Penyelenggaraan *Good Governance*.

Ketujuh isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD tersebut perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kedepannya, terutama di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang. Dan secara khusus isu strategis yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah isu strategis ke tujuh, yaitu **"Penyelenggaraan *Good Governance*".** Dimana Sekretariat Daerah Kota Semarang secara langsung

berkontribusi membantu Wali Kota dalam mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP dan Nilai EKPPD.

Berdasarkan hasil analisi dan perumusan masalah yang mengiringi pembangunan daerah selama ini dan telaahan yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.10.

Tabel Kesimpulan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang

Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Peningkatan nilai SAKIP Kota Semarang • Indeks Reformasi Birokrasi yang terus meningkat • Indeks Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat • Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD) terus meningkat	Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berdaya guna	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	• Perkembangan Teknologi • Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintah yang Dinamis	• Penyelenggaraan *Good Governance* • Optimalisasi sinergitas dan koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah • Meningkatnya tuntutan Masyarakat akan pelayanan prima • Perubahan kondisi pemerintah yang sangat dinamis

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kota Semarang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa visi dan misi setiap OPD di lingkup Kota Semarang berpedoman pada Visi dan Misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Renstra periode 2025-2029 visi dan misi Sekretrariat Daerah Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang.

3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal “Implementasi Reformasi Birokrasi di Seluruh Perangkat Daerah”.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Sekretariat Daerah.

Dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu:

"Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan, Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang Progresif pada Pemerintahan, dan Sistem Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdaya Guna"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Sekretariat Daerah Kota Semarang, yaitu "**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dan Indeks Pelayanan Publik**".

Indikator ini diukur dari Hasil Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB yang meliputi Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja; Nilai kontribusi merupakan nilai yang didapatkan dari kinerja BUMD dan ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan administrasi Pembangunan; Penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini membantu mengevaluasi apakah pelayanan publik sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Sekretariat Daerah Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang, dimana Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif memiliki keterkaitan, dimana penyusunan kebijakan menentukan arah administrasi, dan pengkoordinasian administratif mendukung implementasi kebijakan. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terkait peningkatan kualitas layanan Sekretariat Daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. **Meningkatnya Tata Kelola Hukum.**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Indeks Reformasi Hukum"** , indikator ini diukur dari Hasil Evaluasi atas pelaksanaan reformasi hukum oleh Kementerian Hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi.

2. **Meningkatnya Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah.**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai EKPPD**", indikator ini merupakan hasil Nilai Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Semarang .

3. **Meningkatnya Kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah.**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Berstatus Kinerja Baik**", indikator ini mencerminkan kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik di Kota Semarang.

4. **Meningkatkanya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.**

   Dengan indikator sasaran yaitu **"Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**".

   Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dikatakan efektif dari persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan dengan kriteria sebagai berikut: 90 ± 100 % = efektif, 80 ± 90 % = cukup efektif, 60 ± 80 % = kurang efektif, kurang 60 % = tidak efektif.

5. **Meningkatnya efektifitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan**.

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase meningkatnya kinerja BUMD dari aspek layanan dan keuangan; Tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi Pembangunan; Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR; Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian perekonomian.**

   Indikator ini diukur dari Persentase kinerja BUMD yang dilihat dari aspek pelayanan dan keuangan; Tingkat efektifitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan dihitung dari persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah dan pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang yang nantinya akan dirata-rata kemudian menghasilkan angka persentase. Ruang lingkup kegiatan dari Program CSR yang mendukung Prioritas Daerah (Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015). Pelaksanaan kegiatan pengendalian perekonomian dikatakan efektif dari persentase terfasilitasinya kegiatan pada bidang kelautan, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, kehutanan dan energi sumber daya mineraldengan kriteria sebagai berikut: 90 ± 100 % = efektif 80 ± 90 % =cukup efektif 60 ± 80 % = kurang efektif, kurang 60 % = tidak efektif

6. **Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa.**

   Dengan indikator sasaran yaitu **"Indeks Tata Kelola Pengadaan".**

   Indikator ini diukur dengan dasar Dasar: Sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator "antara" Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata Kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan.

7. **Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase peningkatan nilai kepuasan pimpinan daerah; Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah**".

   Indikator ini mencerminkan kenaikan persentase kepuasan pimpinan daerah (wali kota dan wakil walikota serta jajarannya) terhadap suatu layanan, kebijakan, atau hasil kerja dari layanan keprotokolan, peliputan dan publikasi tiap tahun. Kemudian utnuk tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah didapatkan dari umlah dokumen anggaran dan laporan keuangan yang berkualitas dibagi jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan yang direncanakan dikali seratus. IKM Setda merupakan penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini membantu mengevaluasi apakah pelayanan publik sudah sesuai dengan

standar yang ditetapkan, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

8. **Meningkatnya kepuasan terhadap kinerja pelayanan.**

   Dengan indikator sasaran yaitu **"Indeks Kepuasan Masyarakat (Kota)".**

   Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

9. **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah.**

   Dengan indikator sasaran yaitu **"Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah".**

   Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didapatkan dari akumulasi penilaian terhadap komponen-komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi oleh Inspektorat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas capaian 4 komponen SAKIP.

10. **Meningkatnya proses Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, dan Relevan pada Setda.**

    Dengan indikator sasaran yaitu "**Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan Kota dan Sekretariat Daerah".**

    Keselarasan ini merupakan prinsip utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah. Tingkat Kesesuaian diukur melalui analisis terhadap Renja dan RKPD.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional. - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berdaya guna		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74,09	75,89	77,69	79,49	81,29	83,09	
			Nilai Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	90,5	91,00	91,50	92,00	92,50	92,50	
			Indeks Pelayanan Publik	4,48	4,52	4,56	4,60	4,64	4,66	
		Meningkatnya tata kelola hukum	Indeks Reformasi Hukum	97,92	98,03	98,12	98,33	98,42	98,52	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya pengelolaan kinerja pemerintah daerah	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	3,62	3,71	3,80	3,89	3,99	4,08	
		Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berstatus kinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan	Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya efektifitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	Persentase meningkatnya kinerja BUMD dari aspek layanan dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	92,50%	
			Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	89,60	89,70	89,80	89,90	90,00	90,10	
		Meningkatnya kepuasan terhadap kinerja pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kota)	90,65	90,70	90,75	90,80	90,85	90,90	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan nilai kepuasan pimpinan daerah	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	
			Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	89,15	89,20	89,25	89,30	89,35	89,40	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	80,95	81,00	81,05	81,10	81,15	81,20	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Tersedianya perencanaan yang berkualitas, akuntabel dan relevan pada Sekretariat Daerah	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan kota dan Sekretariat Daerah	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

3.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Sekretariat Daerah Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas Pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan Masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi Sekretariat Daerah Kota Semarang

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rancangan Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opprtunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program Pembangunan maupun yang bersifat eksternal yaitu kebijakandalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Peningkatan Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Peningkatan Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Peningkatan Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Peningkatan Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan
Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah
Peningkatan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor, Harmonisasi Kebijakan, dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Kerangka otonomi	Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor, Harmonisasi Kebijakan, dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Kerangka otonomi	Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor, Harmonisasi Kebijakan, dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Kerangka otonomi	Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor, Harmonisasi Kebijakan, dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Kerangka otonomi	Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor, Harmonisasi Kebijakan, dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Kerangka otonomi
Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
Peningkatan Kualitas Kebijakan BUMD yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis pada *Good Governance*	Peningkatan Kualitas Kebijakan BUMD yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis pada *Good Governance*	Peningkatan Kualitas Kebijakan BUMD yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis pada *Good Governance*	Peningkatan Kualitas Kebijakan BUMD yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis pada *Good Governance*	Peningkatan Kualitas Kebijakan BUMD yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis pada *Good Governance*
Peningkatan Partisipasi Perusahaan yang Terlibat dalam Forum CSR	Peningkatan Partisipasi Perusahaan yang Terlibat dalam Forum CSR	Peningkatan Partisipasi Perusahaan yang Terlibat dalam Forum CSR	Peningkatan Partisipasi Perusahaan yang Terlibat dalam Forum CSR	Peningkatan Partisipasi Perusahaan yang Terlibat dalam Forum CSR
Peningkatan Ketepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Peningkatan Ketepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Peningkatan Ketepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Peningkatan Ketepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Peningkatan Ketepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pemerintah Daerah
Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah
Peningkatan Layanan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan, dan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan, dan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan, dan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan, dan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan, dan Sosial Kemasyarakatan
Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Proses	Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Proses	Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Proses	Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Proses	Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Proses

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa
Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja Keprotokolan, Peliputan, dan Publikasi secara Efektif	Peningkatan Kinerja Keprotokolan, Peliputan, dan Publikasi secara Efektif	Peningkatan Kinerja Keprotokolan, Peliputan, dan Publikasi secara Efektif	Peningkatan Kinerja Keprotokolan, Peliputan, dan Publikasi secara Efektif	Peningkatan Kinerja Keprotokolan, Peliputan, dan Publikasi secara Efektif
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

3.2.2 Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kebijakan merupakan instrument perencanaan yang memberikan panduan kepada Sekretariat Daerah Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas Pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Sekretrariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	Melaksanakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kelurahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	
		Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan sistem merit	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan sakip serta peningkatan hubungan antar lembaga	
		Pengembangan kota cerdas untuk pengelolaan kota berbasis data	Penyusunan peraturan tentang kewenangan dan pendelegasian kewenangan di wilayah serta implementasinya	
			Meningkatkan kualitas kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga melalui pengawasan dan pengendalian kerjasama	
			Kajian peraturan perundang-undangan	
			Penyempurnaan regulasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja	
			Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Perangkat Daerah akan program dan permasalahan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja	
			Mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk produk hasil lokal serta meningkatkan pelayanan dan kinerja usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
			Penyelenggaraan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pembangunan secara baik dan tepat waktu	

NO	OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	
			Optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui Bagian PBJ secara elektronik	
			Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dokumentasi dan peliputan	
			Peningkatan pelayanan kedinasan bagi pimpinan dan Perangkat Daerah	
			Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
			Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
			Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun Langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2026-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
- Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional. **- Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.**	**Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berdaya guna**				**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**		**Sekretaris Daerah**
		Meningkatnya tata kelola hukum			**Indeks Reformasi Hukum**		**Asisten Pemerintahan**
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan		**Persentase produk hukum yang dihasilkan**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kepala Bagian Hukum**
				Terlaksananya penetapan dan pengundangan Produk Hukum Daerah	Persentase ditetapkan dan diundangkannya Produk Hukum Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Subkoordinator Perancangan Produk Hukum Penetapan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tercapainya pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan Informasi Hukum		Subkoordinator Perancangan Produk Hukum Pengaturan, Dokumentasi dan Informasi Hukum
				Terlaksananya bantuan hukum yang diberikan kepada warga Kota Semarang dan Perangkat Daerah	Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada warga Kota Semarang dan Perangkat Daerah		Subkoordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
				Terfasilitasinya penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Staff JFU/JFT Subkoordinator Perancangan Produk Hukum Penetapan
				Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Staff JFU/JFT Subkoordinator Produk Hukum Pengaturan, Dokumentasi dan Informasi Hukum
				Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapat bantuan hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Staff JFU/JFT Subkoordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Meningkatnya pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah			**Nilai EKPPD**		**Asisten Pemerintahan**
			Meningkatnya kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan peran		**Tingkat Efektivitas Kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			pemerintah daerah pada kerangka otonomi				
				Tercapainya peningkatan hasil kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga dalam negeri	Persentase peningkatan hasil kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Daerah lain dan pihak ketiga dalam negeri	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Subkoordinator Kerja Sama Dalam Negeri
				Tercapainya peningkatan kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah dan Lembaga di luar negeri	Persentase peningkatan kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga di Luar Negeri		Subkoordinator Kerja Sama Luar Negeri
				Terlaksananya fasilitasi kerja sama dalam negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Staff JFU/JFT Subkoordinator Kerja Sama Dalam Negeri
				Terlaksananya fasilitasi kerja sama luar negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Staff JFU/JFT Subkoordinator Kerja Sama Luar Negeri
				Terpenuhinya tingkat fasilitasi dan sinkronisasi hubungan antar lembaga pemerintahan	Persentase tingkat fasilitasi dan sinkronisasi hubungan antar Lembaga pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Sub Koordinator Otonomi Daerah
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Staff JFU/JFT Subkoordinator Otonomi Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah			**Persentase kecamatan dan kelurahan yang berstatus kinerja baik**		**Asisten Pemerintahan**
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah		**Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kepala Bagian Tata Pemerintahan**
				Tercapainya kinerja administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Persentase kinerja administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan
				Terwujudnya peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan administrasi kewilayahan	Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan administrasi kewilayahan		Subkoordinator Administrasi Kewilayahan
				Terwujudnya peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase terlaksananya kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		Subkoordinator Partisipasi Masyarakat
				Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Staff JFU/JFT Subkoordinator Administrasi Pemerintahan
				Terlaksananya pengelolaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Staff JFU/JFT Subkoordinator

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				administrasi kewilayahan	administrasi kewilayahan		Administrasi Kewilayahan
				Terfasilitasinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Staff JFU/JFT Subkoordinator Partisipasi Masyarakat
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan			**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**
			Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan		**Persentase kegiatan keagamaan, Kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**
				Tercapainya fasilitasi kegiatan pengelolaan bina mental spriritual	Persentase capaian fasilitasi kegiatan pengelolaan bina mental spriritual	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Subkoordinator Bina Mental Spiritual
				Tercapainya fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial	Persentase capaian fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial		Subkoordinator Kesejahteraan Sosial
				Tercapainya fasilitasi kegiatan kesejahteraan Masyarakat	Persentase capaian fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat		Subkoordinator Kesehatan dan Pengendalian Penduduk
				Terlaksananya fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi	Fasilitasi Pengelolaan Bina Spiritual	Staff JFU/JFT Subkoordinator

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					pengelolaan bina mental spiritual		Bina Mental Spiritual
				Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Staff JFU/JFT Subkoordinator Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Staff JFU/JFT Subkoordinator Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Nilai Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		**Sekretaris Daerah**
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan			**Persentase meningkatnya kinerja BUMD dari aspek layanan dan keuangan**		**Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**
			Meningkatnya kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel dan berbasis pada *good governance*		**Persentase capaian target deviden BUMD**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kepala Bagian Perekonomian dan SDA**
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD		**Kepala Bagian Perekonomian dan SDA**
				Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan pada BUMD	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan pada BUMD	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Subkoordinator Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah
				Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Staff JFU/JFT Subkoordinator Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan			**Tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan**		**Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Meningkatnya ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah		**Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**
				Meningkatnya kualitas fasilitasi penyusunan program pembangunan	Persentase terlaksananya fasilitasi program pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Subkoordinator Penyusunan Program Pembangunan
				Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi program Pembangunan	Persentase terlaksananya pengendalian dan evaluasi program pembangunan		Subkoordinator Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
				Meningkatnya kualitas pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan	Persentase terlaksananya pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan		Subkoordinator Bina Pembangunan Prasarana
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Staff JFU/JFT Subkoordinator Penyusunan Program Pembangunan
				Terlaksananya pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Staff JFU/JFT Subkoordinator Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
				Terlaksananya pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Staff JFU/JFT Subkoordinator Bina Pembangunan Prasarana

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Meningkatnya efektivitas pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang		**Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kepala Bagian Perekonomian dan SDA**
				Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan perekonomian berbasis potensi lokal unggulan	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Subkoordinator Bina Usaha
				Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Staff JFU/JFT Subkoordinator Bina Usaha
				Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan tugas TPAKD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Staff JFU/JFT Subkoordinator Bina Usaha
				Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	Persentase perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Subkoordinator Bina Produksi dan Sumber Daya Alam
				Terlaksananya koordinasi,	Jumlah dokumen hasil koordinasi,	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Staff JFU/JFT Subkoordinator

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKKM, penanaman modal, tenaga kerja	sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, dan tenaga kerja	Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Bina Produksi dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan			**Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR**		**Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**
					Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian perekonomian		**Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**
			Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian		**Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kepala Bagian Perekonomian dan SDA**
				Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR serta kegiatan	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Subkoordinator Bina Produksi dan Sumber Daya Alam

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				pengendalian perekonomian	penyelenggaraan CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian		
				Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi ekonomi	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Staff JFU/JFT Subkoordinator Bina Produksi dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa			**Indeks Tata Kelola Pengadaan**		**Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**
			Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa		**Nilai pemanfaatan sistem pengadaan**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
					Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ		**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
					Nilai tingkat kematangan UKPBJ		**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
				Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Subkoordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik
				Meningkatnya pembinaan dan	Persentase Pembinaan dan		Subkoordinator Pembinaan dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				advokasi pengadaan barang dan jasa	Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
				Terkelolanya pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan barang dan jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Staff JFU/JFT Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
				Terkelolanya layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Staff JFU/JFT Subkoordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik
				Terlaksananya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Staff JFU/JFT Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
					Indeks Pelayanan Publik		**Sekretaris Daerah**
		Meningkatnya kepuasan terhadap kinerja pelayanan			**Indek Kepuasan Masyarakat (Kota)**		**Asisten Pemerintahan**
			Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah		**Indeks Kematangan Organisasi**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepala Bagian Organisasi**
				Terpenuhinya kematangan organisasi perangkat daerah	Tingkat pemenuhan dokumen kematangan organisasi perangkat daerah	Penataan Organisasi	Subkoordinator Kelembagaan Perangkat Daerah dan Tata Laksana
				Terpenuhinya laporan Survey	Tingkat pemenuhan dokumen laporan		Subkoordinator Pelayanan Publik

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat		
				Terpenuhinya kinerja dan reformasi birokrasi	Tingkat pemenuhan dokumen laporan Reformasi Birokrasi		Subkoordinator Pendayagunaan Aparatur Daerah
				Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Staff JFU/JFT Subkoordinator Kelembagaan Perangkat Daerah dan Tata Laksana
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Staff JFU/JFT Subkoordinator Pelayanan Publik
				Terlaksananya peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Staff JFU/JFT Subkoordinator Pendayagunaan Aparatur Daerah
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah			**Persentase peningkatan nilai kepuasan pimpinan daerah**		**Asisten Administrasi Umum**
			Meningkatnya kinerja keprotokolam, peliputan dan publikasi secara efektif		**Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan dan publikasi**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol**
				Terlaksananya layanan keprotokolan pada kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase layanan keprotokolan pada kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kasubag Protokol
				Terlaksananya publikasi kebijakan	Persentase publikasi kebijakan dan		Subkoordinator Komunikasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				dan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana		Pimpinan dan Pemberitaan
				Terlaksananya dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana		Subkoordinator Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan
				Terlaksananya fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Staff JFU/JFT Subbagian Protokol
				Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Staff JFU/JFT Subkoordinator Komunikasi Pimpinan dan Pemberitaan
				Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Staff JFU/JFT Subkoordinator Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah			**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah**		**Asisten Pemerintahan**
			Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas		**Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			kinerja pemerintah daerah				
				Tersedianya dokumen pelaporan kinerja OPD sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase rekomendasi atas laporan kinerja OPD yang ditindaklanjuti	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Otonomi Daerah
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staff JFU/JFT Subkoordinator Otonomi Daerah
		Tersedianya perencanaan yang berkualitas, akuntabel, dan relevan pada Sekretariat Daerah			**Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan kota dan Sekretariat Daerah**		**Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**
			Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Sekretariat Daerah		**Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah yang dihasilkan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Penyusunan Program Pembangunan
				Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staff JFU/JFT Subkoordinator Penyusunan Program Pembangunan
				Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Staff JFU/JFT Subkoordinator Penyusunan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				statistic sektoral daerah	walidata pendukung statistic sektoral daerah	Statistik Sektoral Daerah	Program Pembangunan
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah			**Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah**		**Asisten Administrasi Umum**
			Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah		**Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepala Bagian Keuangan**
				Tersedianya dokumen administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang dihasilkan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan
				Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan
				Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan
				Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				penyusunan dokumen DPA-SKPD	penyusunan dokumen DPA-SKPD		
				Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan
				Terlaksananya administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Persentase administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Verifikasi dan Validasi Keuangan
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staff JFU/JFT Subbagian Verfikasi dan Validasi Keuangan
				Tersedianya dokumen pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan
				Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staff JFU/JFT Subbagian Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan
				Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan
				Tersedianya laporan keuangan bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Staff JFU/JFT Subbagian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan
				Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staff JFU/JFT Subbagian Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan
				Tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kasubag Aset Sekretariat Daerah
				Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Aset Sekretariat Daerah
				Terlaksananya administrasi keuangan KDH dan WKDH	Persentase administrasi keuangan KDH dan WKDH	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kasubag Verifikasi dan Validasi Keuangan
				Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Staff JFU/JFT Subbagian Verifikasi dan Validasi Keuangan
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah			**Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah**		**Asisten Administrasi Umum**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Meningkatnya kualitas layanan rumah tangga Sekretariat Daerah		**Persentase kinerja rumah tangga pada Sekretariat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepala Bagian Rumah Tangga**
				Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kasubag Pengadaan
				Tersedianya rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Terlaksananya tugas KDH dan WKDH	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kasubag Pengadaan
				Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Terpenuhinya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Pengadaan
				Tersedianya pakaian dinas berserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					beserta atribut kelengkapannya		
				Meningkatnya pemeliharaan kendaraan Dinas Perorangan /Operasional Lapangan	Persentase Pemeliharaan Kendaraan dinas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Transportasi
				Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya, mebel dan peralatan mesin lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya, mebel dan peralatan mesin lainnya		Kasubag Pemeliharaan
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staff JFU/JFT Subbagian Transportasi
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staff JFU/JFT Subbagian Transportasi
				Tersedianya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Staff JFU/JFT Subbagian Pemeliharaan
				Tersedianya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staff JFU/JFT Subbagian Pemeliharaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff JFU/JFT Subbagian Pemeliharaan
				Tercapainya kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Sekretariat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Pengadaan
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Terlaksananya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Tersedianya kebutuhan jasa pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Pemeliharaan
				Tersedianya pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Persentase pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kasubag Transportasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staff JFU/JFT Subbagian Pemeliharaan
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staff JFU/JFT Subbagian Transportasi
				Tercapainya pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Pengadaan
				Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Tercapainya fasilitasi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase fasilitasi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kasubag Pengadaan
				Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
				Terlaksananya penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Staff JFU/JFT Subbagian Pengadaan
			Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah		**Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepala Bagian Tata Usaha**
				Tercapainya penggunaan dana penunjang dan operasional KDH/WKDH	Persentase digunakannya dana penunjang dan operasional KDH/WKDH	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
				Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Staff JFU/JFT Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Staff JFU/JFT Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Sekretariat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Administrasi dan Kepegawaian
				Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staff JFU/JFT Subbagian Administrasi dan Kepegawaian
				Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staff JFU/JFT Subbagian Administrasi dan Kepegawaian
				Meningkatnya fasilitasi kunjungan tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Penatalaksanaan Acara
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum		Kasubag Administrasi dan Kepegawaian
				Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staff JFU/JFT Subbagian Penatalaksanaan Acara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Administrasi dan Kepegawaian
				Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Staff JFU/JFT Subbagian Administrasi dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan surat menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Administrasi dan Kepegawaian
				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Staff JFU/JFT Subbagian Administrasi dan Kepegawaian
				Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kasubag Penatalaksanaan Acara
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staff JFU/JFT Subbagian Penatalaksanaan Acara
				Terpenuhinya jasa pelayanan umum Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum		Kasubag Administrasi dan Kepegawaian
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staff JFU/JFT Subbagian Administrasi dan Kepegawaian

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Sekretariat Daerah Kota Semarang

Bidang urusan/Program/ Outcome Kegiatan/Output Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sekretariat Daerah				253.970.452.131		281.168.043.479		293.005.701.193		295.180.110.710		300.309.092.442	
Bagian Hukum				6.008.825.712		6.644.533.184		6.921.222.666		6.972.046.592		7.091.929.709	
4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				6.008.825.712		6.644.533.184		6.921.222.666		6.972.046.592		7.091.929.709	
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100 %	100 %	6.008.825.712	100 %	6.644.533.184	100 %	6.921.222.666	100 %	6.972.046.592	100 %	7.091.929.709	
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				6.008.825.712		6.644.533.184		6.921.222.666		6.972.046.592		7.091.929.709	
Terlaksananya penetapan dan pengundangan Produk Hukum Daerah	Persentase ditetapkan dan diundangkannya produk hukum daerah	100 %	100 %	1.081.588.628	100 %	1.196.015.973	100 %	1.245.820.080	100 %	1.254.968.387	100 %	1.276.547.348	
Tercapainya pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan pengelolaan Informasi Hukum	Persentsae pendokumentasian produk hukum daerah dan pengelolaan informasi hukum	100 %	100 %	3.004.412.856	100 %	3.322.266.592	100 %	3.460.611.333	100 %	3.486.023.296	100 %	3.545.964.854	
Terlaksananya bantuan hukum yang diberikan kepada warga Kota Semarang dan Perangkat Daerah	Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada warga Kota Semarang dan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.922.824.228	100 %	2.126.250.619	100 %	2.214.791.253	100 %	2.231.054.909	100 %	2.269.417.507	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				1.081.588.628		1.196.015.973		1.245.820.080		1.254.968.387		1.276.547.348	
		Terfasilitasinya penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang disusun	565 dokumen	565 dokumen	1.081.588.628	565 dokumen	1.196.015.973	565 dokumen	1.245.820.080	565 dokumen	1.254.968.387	565 dokumen	1.276.547.348	
		4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum				1.922.824.228		2.126.250.619		2.214.791.253		2.231.054.909		2.269.417.507	
		Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan bantuan hukum	55 kasus	55 kasus	1.922.824.228	55 kasus	2.126.250.619	55 kasus	2.214.791.253	55 kasus	2.231.054.909	55 kasus	2.269.417.507	
		4.01.02.2.03.0003 Pendokumantasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				3.004.412.856		3.322.266.592		3.460.611.333		3.486.023.296		3.545.964.854	
		Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	1000 dokumen	550 dokumen	3.004.412.856	550 dokumen	3.322.266.592	550 dokumen	3.460.611.333	550 dokumen	3.486.023.296	550 dokumen	3.545.964.854	
Bagian Tata Pemerintahan						4.480.785.439		4.954.832.935		5.161.160.471		5.199.059.907		5.288.456.829	
4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						4.480.785.439		4.954.832.935		5.161.160.471		5.199.059.907		5.288.456.829	
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah			Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	100 %	100 %	4.480.785.439	100 %	4.954.832.935	100 %	5.161.160.471	100 %	5.199.059.907	100 %	5.288.456.829	

Bidang urusan/Program/ Outcome		Indikator Outcome/Output	Baseline 2024										Ket
Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030	
Sub Kegiatan/Output				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan					4.480.785.439		4.954.832.935		5.161.160.471		5.199.059.907		5.288.456.829	
Tercapainya kinerja administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan		Persentase kinerja administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	100%	100 %	3.170.557.556	100 %	3.328.573.388	100 %	3.397.349.233	100 %	3.409.982.379	100 %	3.439.781.353	
Terwujudnya peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan administrasi kewilayahan		Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan administrasi kewilayahan	82,33 %	83,5 %	486.394.747	84 %	644.410.579	84,5 %	713.186.425	85 %	725.819.569	85,5 %	755.618.543	
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	100 %	100 %	823.833.136	100 %	981.848.968	100 %	1.050.624.813	100 %	1.063.257.959	100 %	1.093.056.933	
	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan				3.170.557.556		3.328.573.388		3.397.349.233		3.409.982.379		3.439.781.353	
	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	3.170.557.556	2 dokumen	3.328.573.388	2 dokumen	3.397.349.233	2 dokumen	3.409.982.379	2 dokumen	3.439.781.353	
	4.01.02.2.01.0002				486.394.747		644.410.579		713.186.425		725.819.569		755.618.543	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
Terlaksananya pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	486.394.747	2 dokumen	644.410.579	2 dokumen	713.186.425	2 dokumen	725.819.569	2 dokumen	755.618.543	
4.01.02.2.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				823.833.136		981.848.968		1.050.624.813		1.063.257.959		1.093.056.933	
Terfasilitasinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan fasilitasi peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	16 kecamatan	16 kecamatan	823.833.136	16 kecamatan	981.848.968	16 kecamatan	1.050.624.813	16 kecamatan	1.063.257.959	16 kecamatan	1.093.056.933	
Bagian Administrasi Pembangunan				1.105.391.614		1.222.337.211		1.273.237.378		1.282.587.016		1.304.640.874	
4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan				988.461.133		1.093.035.996		1.138.551.844		1.146.912.459		1.166.633.417	
Meningkatnya ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan	80 %	82 %	988.461.133	83 %	1.093.035.996	84 %	1.138.551.844	85 %	1.146.912.459	86 %	1.166.633.417	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pemerintah daerah												
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				988.461.133		1.093.035.996		1.138.551.844		1.146.912.459		1.166.633.417	
Meningkatnya kualitas fasilitasi penyusunan program pembangunan	Persentase terlaksananya fasilitasi program Pembangunan	100 %	100 %	197.315.490	100 %	218.190.605	100 %	227.276.426	100 %	228.945.362	100 %	232.882.040	
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Persentase terlaksananya pengendalian dan evaluasi program Pembangunan	100 %	100 %	609.472.243	100 %	673.951.740	100 %	702.016.218	100 %	707.171.264	100 %	719.330.949	
Meningkatnya kualitas pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan	Persentase terlaksananya pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	100 %	100 %	181.673.400	100 %	200.893.651	100 %	209.259.200	100 %	210.795.833	100 %	214.420.428	
4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				197.315.490		218.190.605		227.276.426		228.945.362		232.882.040	
Terlaksananya fasilitasi penyusunan program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program Pembangunan	2 dokumen	2 dokumen	197.315.490	2 dokumen	218.190.605	2 dokumen	227.276.426	2 dokumen	228.945.362	2 dokumen	232.882.040	
4.01.03.2.02.0002				609.472.243		673.951.740		702.016.218		707.171.264		719.330.949	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
		Terlaksananya pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program Pembangunan	12 laporan	12 laporan	609.472.243	12 laporan	673.951.740	12 laporan	702.016.218	12 laporan	707.171.264	12 laporan	719.330.949	
		4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				181.673.400		200.893.651		209.259.200		210.795.833		214.420.428	
		Terlaksananya pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	12 laporan	12 laporan	181.673.400	12 laporan	200.893.651	12 laporan	209.259.200	12 laporan	210.795.833	12 laporan	214.420.428	
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						116.930.481		129.301.215		134.685.534		135.674.557		138.007.457	
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Sekretariat Daerah			Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas	100 %	100 %	116.930.481	100 %	129.301.215	100 %	134.685.534	100 %	135.674.557	100 %	138.007.457	
	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					116.930.481		129.301.215		134.685.534		135.674.557		138.007.457	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024										Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030	
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang dihasilkan	100 %	100 %	116.930.481	100 %	129.301.215	100 %	134.685.534	100 %	135.674.557	100 %	138.007.457	
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				66.930.481		79.301.215		84.685.534		85.674.557		88.007.457	
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	66.930.481	3 dokumen	79.301.215	3 dokumen	84.685.534	3 dokumen	85.674.557	3 dokumen	88.007.457	
4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sectoral daerah	NA	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	
Bagian Kesejahteraan Rakyat				54.189.060.965		59.922.026.539		62.417.280.008		62.875.622.614		63.956.757.900	
4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				54.189.060.965		59.922.026.539		62.417.280.008		62.875.622.614		63.956.757.900	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024										Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030	
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 %	100 %	54.189.060.965	100 %	59.922.026.539	100 %	62.417.280.008	100 %	62.875.622.614	100 %	63.956.757.900	
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				54.189.060.965		59.922.026.539		62.417.280.008		62.875.622.614		63.956.757.900	
Tercapainya fasilitasi kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	Persentase capaian fasilitasi kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	100 %	100 %	43.389.060.965	100 %	48.500.000.000	100 %	49.967.280.008	100 %	50.105.622.614	100 %	50.971.757.900	
Tercapainya fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial	Persentase capaian fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial	100 %	100 %	9.950.000.000	100 %	10.500.000.000	100 %	11.500.000.000	100 %	11.800.000.000	100 %	12.000.000.000	
Tercapainya fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat	Persentase capaian fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat	100 %	100 %	850.000.000	100 %	922.026.539	100 %	950.000.000	100 %	970.000.000	100 %	985.000.000	
4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Spiritual				43.389.060.965		48.500.000.000		49.967.280.008		50.105.622.614		50.971.757.900	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	13 dokumen	13 dokumen	43.389.060.965	13 dokumen	48.500.000.000	13 dokumen	49.967.280.008	13 dokumen	50.105.622.614	13 dokumen	50.971.757.900	
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi				9.950.000.000		10.500.000.000		11.500.000.000		11.800.000.000		12.000.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 dokumen	11 dokumen	9.950.000.000	11 dokumen	10.500.000.000	11 dokumen	11.500.000.000	11 dokumen	11.800.000.000	11 dokumen	12.000.000.000	
		4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				850.000.000		922.026.539		950.000.000		970.000.000		985.000.000	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,	7 dokumen	7 dokumen	850.000.000	7 dokumen	922.026.539	7 dokumen	950.000.000	7 dokumen	970.000.000	7 dokumen	985.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome Kegiatan/Output Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas												
Bagian Organisasi				3.385.355.195		3.743.510.964		3.899.397.025		3.928.031.080		3.995.572.884	
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.385.355.195		3.743.510.964		3.899.397.025		3.928.031.080		3.995.572.884	
Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Indeks kematangan organisasi	42,25	42,27	3.385.355.195	42,28	3.743.510.964	42,29	3.899.397.025	42,30	3.928.031.080	42,31	3.995.572.884	
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi				3.385.355.195		3.743.510.964		3.899.397.025		3.928.031.080		3.995.572.884	
Terpenuhinya kematangan organisasi perangkat daerah	Tingkat pemenuhan dokumen kematangan organisasi perangkat daerah	100 %	100 %	800.000.000	100 %	919.385.256	100 %	971.347.276	100 %	980.891.961	100 %	1.003.405.895	

Bidang urusan/Program/ Outcome		Indikator Outcome/Output	Baseline 2024										Ket
Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030	
Sub Kegiatan/Output				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terpenuhinya laporan Survey Kepuasan Masyarakat		Tingkat pemenuhan laporan Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	1.835.355.195	100 %	1.954.740.451	100 %	2.006.702.471	100 %	2.016.247.156	100 %	2.038.761.090	
Terpenuhinya kinerja dan Reformasi Birokrasi		Tingkat pemenuhan laporan Reformasi Birokrasi	100 %	100 %	750.000.000	100 %	869.385.257	100 %	921.347.278	100 %	930.891.963	100 %	953.405.899	
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					800.000.000		919.385.256		971.347.276		980.891.961		1.003.405.895	
Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan		Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	1 dokumen	1 dokumen	800.000.000	1 dokumen	919.358.256	1 dokumen	971.347.276	1 dokumen	980.891.961	1 dokumen	1.003.405.895	
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1.835.355.195		1.954.740.451		2.006.702.471		2.016.247.156		2.038.761.090	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1 laporan	1 laporan	1.835.355.195	1 laporan	1.954.740.451	1 laporan	2.006.702.471	1 laporan	2.016.247.156	1 laporan	2.038.761.090	
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					750.000.000		869.385.257		921.347.278		930.891.963		953.405.899	
Terlaksananya peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan	1 dokumen	1 dokumen	750.000.000	1 dokumen	869.385.257	1 dokumen	921.347.278	1 dokumen	930.891.963	1 dokumen	953.405.899	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	reformasi birokrasi												
Bagian Tata Usaha				34.836.605.594		39.640.587.872		41.186.169.057		40.651.703.033		40.705.291.162	
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				34.836.605.594		39.640.587.872		41.186.169.057		40.651.703.033		40.705.291.162	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	100 %	100 %	34.836.605.594	100 %	39.640.587.872	100 %	41.186.169.057	100 %	40.651.703.033	100 %	40.705.291.162	
4.01.01.02.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				202.893.880		229.656.561		234.338.354		234.572.692		236.890.462	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Sekretariat Daerah	NA	86	202.893.880	87	229.656.561	88	234.338.354	89	234.572.692	90	236.890.462	
4.01.01.02.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.273.391		2.955.408		3.103.179		3.106.282		3.109.387	
Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	12 dokumen	2.273.391	12 dokumen	2.955.408	12 dokumen	3.103.179	12 dokumen	3.106.282	12 dokumen	3.109.387	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
4.01.01.02.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200.620.489		226.701.153		231.235.175		231.466.410		233.781.075	
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	200 orang	200.620.489	200 orang	226.701.153	200 orang	231.235.175	200 orang	231.466.410	200 orang	233.781.075	
4.01.01.02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				21.892.421.568		25.182.729.163		26.012.218.447		25.441.329.148		25.464.868.223	
Meningkatnya fasilitasi kunjungan tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu	100 %	100 %	10.781.942.703	100 %	11.881.136.973	100 %	12.237.571.082	100 %	11.949.808.653	100 %	11.959.306.740	
Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 %	100 %	11.110.478.865	100 %	13.301.592.190	100 %	13.774.647.365	100 %	13.774.647.365	100 %	13.491.520.495	
4.01.01.02.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.781.942.703		11.881.136.973		12.237.571.082		11.949.808.653		11.959.306.740	
Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	10.781.942.703	12 laporan	11.881.136.973	12 laporan	12.237.571.082	12 laporan	11.949.808.653	12 laporan	11.959.306.740	
4.01.01.02.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				11.025.655.275		13.208.286.241		13.677.609.178		13.394.385.270		13.408.329.123	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		dan Konsultasi SKPD													
		Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	14 laporan	14 laporan	11.025.655.275	14 laporan	13.208.286.241	14 laporan	13.677.609.178	14 laporan	13.394.385.270	14 laporan	13.408.329.123	
		4.01.01.02.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				84.823.590		93.305.949		97.038.187		97.135.225		97.232.360	
		Terlaksananya panatatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	NA	100 dokumen	84.823.590	100 dokumen	93.305.949	100 dokumen	97.038.187	100 dokumen	97.135.225	100 dokumen	97.232.360	
	4.01.01.02.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.470.244.567		7.204.887.900		7.565.132.295		7.593.813.280		7.608.332.496	
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang Sekretariat Daerah		Persentase pemenuhan surat menyurat	100 %	100 %	120.000.000	100 %	150.000.000	100 %	157.500.000	100 %	157.657.500	100 %	157.815.158	
	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah		Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	2.869.300.785	100 %	3.156.230.864	100 %	3.314.042.407	100 %	3.317.356.449	100 %	3.320.530.014	
	Terpenuhinya jasa pelayanan umum Sekretariat Daerah		Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum	100 %	100 %	3.480.943.782	100 %	3.898.657.036	100 %	4.093.589.888	100 %	4.118.799.331	100 %	4.129.987.324	
		4.01.01.02.08.0001				120.000.000		150.000.000		157.500.000		157.657.500		157.815.158	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	120.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	144.900.000	12 laporan	157.657.500	12 laporan	157.815.158	
		4.01.01.02.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.869.300.785		3.156.230.864		3.314.042.407		3.317.356.449		3.320.530.014	
		Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	2.869.300.785	12 laporan	3.156.230.864	12 laporan	3.314.042.407	12 laporan	3.317.356.449	12 laporan	3.320.530.014	
		4.01.01.02.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.480.943.782		3.898.657.036		4.093.589.888		4.118.799.331		4.129.987.324	
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	3.480.943.782	12 laporan	3.898.657.036	12 laporan	4.093.589.888	12 laporan	4.118.799.331	12 laporan	4.129.987.324	
	4.01.01.02.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					6.271.045.579		7.023.314.248		7.374.479.961		7.381.987.913		7.395.199.981	
	Tercapainya penggunaan dana penunjang dan		Persentase digunakannya dana penunjang	100 %	100 %	6.271.045.579	100 %	7.023.314.248	100 %	7.374.479.961	100 %	7.381.987.913	100 %	7.395.199.981	

Bidang urusan/Program/ Outcome Kegiatan/Output Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
operasional KDH/WKDH	dan operasional KDH/WKDH												
4.01.01.02.11.0003 Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12.840.000		14.124.000		14.830.200		14.978.502		14.993.481	
Terlaksananya *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	NA	8 orang	12.840.000	8 orang	14.124.000	8 orang	14.830.200	8 orang	14.978.502	8 orang	14.993.481	
4.01.01.02.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.258.205.579		7.009.190.248		7.359.649.761		7.367.009.411		7.380.206.500	
Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	6.258.205.579	2 orang	7.009.190.248	2 orang	7.359.649.761	2 orang	7.367.009.411	2 orang	7.380.206.500	
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				3.504.135.305		3.874.857.489		4.036.213.040		4.065.851.762		4.135.763.369	
4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan				3.504.135.305		3.874.857.489		4.036.213.040		4.065.851.762		4.135.763.369	
Meningkatnya efisiensi, transparansi dan	Nilai pemanfaatan	24,79	24,89	3.504.135.305	24,94	3.874.857.489	24,99	4.036.213.040	25,04	4.065.851.762	25,09	4.135.763.369	

Bidang urusan/Program/ Outcome Kegiatan/Output Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	sistem pengadaan												
	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	24,71	24,81		24,86		24,91		24,96		25,01		
	Nilai tingkat kematangan UKPBJ	40	40		40		40		40		40		
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3.504.135.305		3.874.857.489		4.036.213.040		4.065.851.762		4.135.763.369	
Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %	3.504.135.305	100 %	3.874.857.489	100 %	4.036.213.040	100 %	4.065.851.762	100 %	4.135.763.369	
Meningkatnya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
Meningkatnya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.750.135.305		2.074.857.489		2.136.213.040		2.145.851.762		2.200.763.369	
Terkelolanya pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan barang dan jasa	12 dokumen	12 dokumen	1.750.135.305	12 dokumen	2.074.857.489	12 dokumen	2.136.213.040	12 dokumen	2.145.851.762	12 dokumen	2.200.763.369	
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan				810.000.000		850.000.000		900.000.000		910.000.000		920.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Barang dan Jasa secara Elektronik													
Terkelolanya layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	12 dokumen	12 dokumen	810.000.000	12 dokumen	850.000.000	12 dokumen	900.000.000	12 dokumen	910.000.000	12 dokumen	920.000.000	
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik				944.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.010.000.000		1.015.000.000	
Terlaksananya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlag orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	220 orang	40 orang	944.000.000	50 orang	950.000.000	60 orang	1.000.000.000	70 orang	1.010.000.000	80 orang	1.015.000.000	
Bagian Rumah Tangga				59.698.241.864		67.930.654.037		70.579.261.094		69.663.365.830		69.755.197.887	
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota				59.698.241.864		67.930.654.037		70.579.261.094		69.663.365.830		69.755.197.887	
Meningkatnya kualitas layanan rumah tangga Sekretariat Daerah	Persentase kinerja rumah tangga pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	59.698.241.864	100 %	67.930.654.037	100 %	70.579.261.094	100 %	69.663.365.830	100 %	69.755.197.887	
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				121.428.000		125.000.000		127.000.000		128.000.000		130.000.000	
Terlaksananya pengelolaan	Persentase pengelolaan	100 %	100 %	121.428.000	100 %	125.000.000	100 %	127.000.000	100 %	128.000.000	100 %	130.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
	Kegiatan/Output				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Sub Kegiatan/Output													
	administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan		administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan												
		4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				121.428.000		125.000.000		127.000.000		128.000.000		130.000.000	
		Tersedianya rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	121.428.000	2 dokumen	125.000.000	2 dokumen	127.000.000	2 dokumen	128.000.000	2 dokumen	130.000.000	
	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					180.000.000		5.180.000.000		190.000.000		200.000.000		5.220.000.000	
	Terpenuhinya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya		Persentase pemenuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	100 %	100 %	180.000.000	100 %	5.1800.000.000	100 %	190.000.000	100 %	200.000.000	100 %	5.220.000.000	
		4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan				180.000.000		5.180.000.000		190.000.000		200.000.000		5.220.000.000	
		Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	4 paket	3 paket	180.000.000	4 paket	5.180.000.000	3 paket	190.000.000	3 paket	200.000.000	4 paket	5.220.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.012.337.300		3.720.000.000		3.855.000.000		3.990.000.000		4.070.000.000	
	Tercapainya kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Sekretariat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Sekretariat Daerah	100 %	100 %	4.012.337.300	100 %	3.720.000.000	100 %	3.855.000.000	100 %	3.990.000.000	100 %	4.070.000.000	
		4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.065.221.500		1.120.000.000		1.135.000.000		1.140.000.000		1.150.000.000	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	1.065.221.500	5 paket	1.120.000.000	5 paket	1.135.000.000	5 paket	1.140.000.000	5 paket	1.150.000.000	
		4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				733.518.500		800.000.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000	
		Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	733.518.500	5 paket	800.000.000	5 paket	850.000.000	5 paket	900.000.000	5 paket	950.000.000	
		4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				713.597.300		800.000.000		870.000.000		950.000.000		970.000.000	
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan	5 paket	5 paket	713.597.300	5 paket	800.000.000	5 paket	870.000.000	5 paket	950.000.000	5 paket	970.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			penggandaan yang disediakan												
		4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
		Terlaksananya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	3 dokumen	1.500.000.000	3 dokumen	1.000.000.000	3 dokumen	1.000.000.000	3 dokumen	1.000.000.000	3 dokumen	1.000.000.000	
	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.750.000.000		12.258.625.049		11.300.000.000		10.500.000.000		17.090.131.077	
	Tercapainya pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	9.750.000.000	100 %	12.258.625.049	100 %	11.300.000.000	100 %	10.500.000.000	100 %	17.090.131.077	
		4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		5.000.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 unit	1 unit	1.000.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	4 unit	5.000.000.000	
		4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000.000		6.000.000.000		4.900.000.000		4.000.000.000		4.800.000.000	
		Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	3 unit	1.000.000.000	3 unit	6.000.000.000	7 unit	4.900.000.000	4 unit	4.000.000.000	12 unit	4.800.000.000	
		4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel				750.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		2.500.000.000	
		Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	66 paket	80 paket	750.000.000	80 paket	800.000.000	80 paket	1.000.000.000	80 paket	1.200.000.000	100 paket	2.500.000.000	
		4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000.000		3.458.625.049		3.400.000.000		3.300.000.000		3.290.131.077	
		Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	59 unit	170 unit	4.000.000.000	160 unit	3.458.625.049	160 unit	3.400.000.000	160 unit	3.300.000.000	150 unit	3.290.131.077	
		4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	NA	1 unit	3.000.000.000	1 unit	1.500.000.000	1 unit	1.500.000.000	1 unit	1.500.000.000	1 unit	1.500.000.000	
	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.736.948.918		12.903.219.632		13.053.219.632		13.203.219.632		13.353.219.632	
	Tersedianya kebutuhan jasa pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	9.403.219.632	100 %	9.403.219.632	100 %	9.403.219.632	100 %	9.403.219.632	100 %	9.403.219.632	
	Tersedianya pemenuhan jasa pelayanan umum kantor		Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	3.333.729.286	100 %	3.500.000.000	100 %	3.650.000.000	100 %	3.800.000.000	100 %	3.950.000.000	
		4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.403.219.632		9.403.219.632		9.403.219.632		9.403.219.632		9.403.219.632	
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	3 laporan	9.403.219.632	3 laporan	9.403.219.632	3 laporan	9.403.219.632	3 laporan	9.403.219.632	3 laporan	9.403.219.632	
		4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.333.729.286		3.500.000.000		3.650.000.000		3.800.000.000		3.950.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome		Indikator Outcome/Output	Baseline 2024										Ket
Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030	
Sub Kegiatan/Output				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	2 laporan	3.333.729.286	2 laporan	3.500.000.000	2 laporan	3.650.000.000	2 laporan	3.800.000.000	2 laporan	3.950.000.000	
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28.092.190.846		28.938.472.556		37.248.704.662		36.836.809.398		25.086.510.378	
Meningkatnya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, Mebel dan Peralatan Mesin lainnya		Persentase pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, Mebel dan Peralatan Mesin lainnya	100 %	100 %	25.051.735.499	100 %	25.755.792.557	100 %	33.866.024.663	100 %	33.254.129.399	100 %	21.403.830.379	
Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan /Operasional Lapangan		Persentase pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan /Operasional Lapangan	100 %	100 %	3.040.455.347	100 %	3.182.679.999	100 %	3.382.679.999	100 %	3.582.679.999	100 %	3.682.679.999	
4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel					121.078.800		130.000.000		140.000.000		150.000.000		170.000.000	
Tersedianya pemeliharaan mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	1500 unit	260 unit	121.078.800	260 unit	130.000.000	260 unit	140.000.000	260 unit	150.000.000	260 unit	170.000.000	
4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.278.952.562		3.400.000.000		3.800.000.000		3.450.000.000		3.550.000.000	
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	NA	250 unit	3.278.952.562	250 unit	3.400.000.000	250 unit	3.800.000.000	250 unit	3.450.000.000	250 unit	3.550.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.651.704.137		22.225.792.557		29.926.024.663		29.654.129.399		17.683.830.379	
		Tersedianya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	14 unit	16 unit	21.651.704.137	15 unit	22.225.792.5570	15 unit	29.926.024.663	15 unit	29.654.129.399	15 unit	17.683.830.379	
		4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				182.679.999		182.679.999		182.679.999		182.679.999		182.679.999	
		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	4 unit	182.679.999	4 unit	182.679.999	4 unit	182.679.999	4 unit	182.679.999	4 unit	182.679.999	
		4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.857.775.348		3.000.000.000		3.200.000.000		3.400.000.000		3.500.000.000	
		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah kendaraan dinas	221 unit	149 unit	2.857.775.348	149 unit	3.000.000.000	149 unit	3.200.000.000	149 unit	3.400.000.000	149 unit	3.500.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome		Indikator Outcome/Output	Baseline 2024										Ket
Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030	
Sub Kegiatan/Output				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya												
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					850.336.800		850.336.800		850.336.800		850.336.800		850.336.800	
Terlaksananya tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100 %	850.336.800	100 %	850.336.800	100 %	850.336.800	100 %	850.336.800	100 %	850.336.800	
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					850.336.800		850.336.800		850.336.800		850.336.800		850.336.800	
Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	24 paket	12 paket	850.336.800	12 paket	850.336.800	12 paket	850.336.800	12 paket	850.336.800	12 paket	850.336.800	
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					3.955.000.000		3.955.000.000		3.955.000.000		3.955.000.000		3.955.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tercapainya fasilitasi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase fasilitasi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100 %	3.955.000.000	100 %	3.955.000.000	100 %	3.955.000.000	100 %	3.955.000.000	100 %	3.955.000.000	
4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.575.000.000		2.575.000.000		2.575.000.000		2.575.000.000		2.575.000.000	
Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	12 paket	2.575.000.000	12 paket	2.575.000.000	12 paket	2.575.000.000	12 paket	2.575.000.000	12 paket	2.575.000.000	
4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.380.000.000		1.380.000.000		1.380.000.000		1.380.000.000		1.380.000.000	
Terlaksananya penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	12 paket	1.380.000.000	12 paket	1.380.000.000	12 paket	1.380.000.000	12 paket	1.380.000.000	12 paket	1.380.000.000	
Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah				9.086.124.573		10.047.396.801		10.465.787.219		10.542.639.594		10.723.918.430	
4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				8.311.055.480		9.190.328.789		9.573.029.460		9.643.326.136		9.809.141.435	
Meningkatnya kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan	Tingkat efektivitas kerjasama	60 %	85 %	8.311.055.480	90 %	9.190.328.789	95 %	9.573.029.460	100 %	9.643.326.136	100 %	9.809.141.435	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
peran pemerintah daerah pada kerangka otonomi	daerah dan kebijakan otonomi daerah												
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan				465.513.319		758.604.422		886.171.313		909.603.539		964.875.306	
Terpenuhinya tingkat fasilitasi dan sinkronisasi hubungan antar lembaga pemerintahan	Persentase tingkat fasilitasi dan sinkronisasi hubungan antar lembaga	50 %	70 %	465.513.319	80 %	758.604.422	90 %	886.171.313	100 %	909.603.539	100 %	964.875.306	
4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				465.513.319		758.604.422		886.171.313		909.603.539		964.875.306	
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	15 dokumen	3 dokumen	465.513.319	3 dokumen	758.604.422	3 dokumen	886.171.313	3 dokumen	909.603.539	3 dokumen	964.875.306	
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah				7.845.542.161		8.431.724.367		8.686.858.147		8.733.722.597		8.844.266.129	
Tercapainya peningkatan hasil Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga dalam negeri	Persentase peningkatan hasil Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga dalam negeri	100 %	60%	1.915.924.852	70 %	2.209.015.955	80 %	2.336.582.845	90 %	2.360.015.070	100 %	2.415.286.836	
Tercapainya peningkatan Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan	Persentase peningkatan Kerjasama Pemerintah Kota	100 %	60%	5.929.617.309	70 %	6.222.708.412	80 %	6.350.275.302	90 %	6.373.707.527	100 %	6.428.979.293	

Bidang urusan/Program/ Outcome Kegiatan/Output Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri	Semarang dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri												
4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1.915.924.852		2.209.015.955		2.336.582.845		2.360.015.070		2.415.286.836	
Terlaksananya fasilitasi kerjasama dalam negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	25 dokumen	22 dokumen	1.915.924.852	24 dokumen	2.209.015.955	26 dokumen	2.336.582.845	28 dokumen	2.360.015.070	30 dokumen	2.415.286.836	
4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				5.929.617.309		6.222.708.412		6.350.275.302		6.373.707.527		6.428.979.293	
Terlaksananya fasilitasi kerjasama luar negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	2 dokumen	4 dokumen	5.929.617.309	5 dokumen	6.222.708.412	6 dokumen	6.350.275.302	7 dokumen	6.373.707.527	8 dokumen	6.428.979.293	
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				775.069.093		857.068.012		892.757.759		899.313.458		914.776.995	
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas	100 %	100 %	775.069.093	100 %	857.068.012	100 %	892.757.759	100 %	899.313.458	100 %	914.776.995	
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				775.069.093		857.068.012		892.757.759		899.313.458		914.776.995	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya dokumen pelaporan kinerja OPD sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase rekomendasi atas laporan kinerja OPD yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	NA	100 %	775.069.093	100 %	857.068.012	100 %	892.757.759	100 %	899.313.458	100 %	914.776.995	
4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				775.069.093		857.068.012		892.757.759		899.313.458		914.776.995	
Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	NA	7 laporan	775.069.093	7 laporan	857.068.012	7 laporan	892.757.759	7 laporan	899.313.458	7 laporan	914.776.995	
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				5.807.539.227		6.421.951.470		6.689.372.276		6.738.493.679		6.854.360.894	
4.01.02 Program Perekonomian dan Pembangunan				5.807.539.227		6.421.951.470		6.689.372.276		6.738.493.679		6.738.493.679	
Meningkatnya kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel dan berbasis pada *good governance*	Persentase capaian target dividen BUMD	95,29 %	98,50 %	1.147.138.141	99 %	1.346.942.222	100 %	1.433.082.490	100 %	1.446.456.291	100 %	1.484.078.696	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	86,38 %	87,18 %		87,60 %		88 %		88,40 %		88,80 %		
Meningkatnya efektivitas pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan	NA	100 %	3.597.928.953	100 %	3.812.733.034	100 %	3.907.873.303	100 %	3.930.247.104	100 %	3.971.869.509	

Bidang urusan/Program/ Outcome Kegiatan/Output Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	DBHCHT di Kota Semarang												
Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	NA	100 %	1.062.472.133	100 %	1.262.276.214	100 %	1.348.416.483	100 %	1.361.790.284	100 %	1.398.412.689	
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				5.552.539.227		6.161.951.470		6.429.372.276		6.468.493.679		6.584.360.894	
Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan pada BUMD	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan pada BUMD	100 %	100 %	1.147.138.141	100 %	1.346.942.222	100 %	1.433.082.490	100 %	1.446.456.291	100 %	1.484.078.696	
Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal	100 %	100 %	3.342.928.953	100 %	3.552.733.034	100 %	3.647.873.303	100 %	3.660.247.104	100 %	3.701.869.509	
Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan CSR serta kegiatan	NA	100 %	1.062.472.133	100 %	1.262.276.214	100 %	1.348.416.483	100 %	1.361.790.284	100 %	1.398.412.689	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			pengendalian perekonomian												
		4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1.147.138.141		1.346.942.222		1.433.082.490		1.446.456.291		1.484.078.696	
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	8 dokumen	7 dokumen	1.147.138.141	7 dokumen	1.346.942.222	7 dokumen	1.433.082.490	7 dokumen	1.446.456.291	7 dokumen	1.484.078.696	
		4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1.062.472.133		1.262.276.214		1.348.416.483		1.361.790.284		1.398.412.689	
		Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi ekonomi	8 laporan	4 laporan	1.062.472.133	4 laporan	1.262.276.214	4 laporan	1.348.416.483	4 laporan	1.361.790.284	4 laporan	1.398.412.689	
		4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil				3.242.928.953		3.442.733.034		3.527.873.303		3.540.247.104		3.576.869.509	
		Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan	9 dokumen	8 dokumen	3.242.928.953	8 dokumen	3.442.733.034	8 dokumen	3.527.873.303	8 dokumen	3.540.247.104	8 dokumen	3.576.869.509	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			ekonomi mikro kecil												
		4.01.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)				100.000.000		110.000.000		120.000.000		120.000.000		125.000.000	
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan tugas TPAKD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	NA	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	110.000.000	4 dokumen	120.000.000	4 dokumen	120.000.000	4 dokumen	125.000.000	
	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					255.000.000		260.000.000		260.000.000		270.000.000		270.000.000	
	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai		Persentase perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	100 %	100 %	255.000.000	100 %	260.000.000	100 %	260.000.000	100 %	270.000.000	100 %	270.000.000	
		4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				255.000.000		260.000.000		260.000.000		270.000.000		270.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikananm perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	6 dokumen	6 dokumen	255.000.000	6 dokumen	260.000.000	6 dokumen	260.000.000	6 dokumen	270.000.000	6 dokumen	270.000.000	
Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol				23.582.168.612		26.077.058.879		27.162.951.253		27.362.414.252		27.832.906.158	
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				23.582.168.612		26.077.058.879		27.162.951.253		27.362.414.252		27.832.906.158	
Meningkatnya kinerja keprotokolan, peliputan dan publikasi secara efektif	Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan dan publikasi	87	89	23.582.168.612	90	26.077.058.879	91	27.162.951.253	92	27.362.414.252	93	27.832.906.158	
4.01.02.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				23.582.168.612		26.077.058.879		27.162.951.253		27.362.414.252		27.832.906.158	
Terlaksananya layanan keprotokolan Kepala Daerah, Wakil Kepala	Persentase layanan keprotokolan kegiatan Kepala	100 %	100 %	2.090.501.628	100 %	2.922.131.717	100 %	3.284.095.842	100 %	3.350.583.508	100 %	3.507.414.144	

Bidang urusan/Program/ Outcome		Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
Kegiatan/Output	Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Daerah dan Sekretaris Daerah		Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana												
Terlaksananya publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	14.194.037.448	100 %	15.025.667.537	100 %	15.387.631.661	100 %	15.454.119.327	100 %	15.610.949.9	
Terlaksannaya dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana		Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	7.297.629.536	100 %	8.129.259.625	100 %	8.491.223.750	100 %	8.557.711.417	100 %	8.714.542.052	
	4.01.02.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan				2.090.501.628		2.922.131.717		3.284.095.842		3.350.583.508		3.507.414.144	
	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	12 laporan	2.090.501.628	12 laporan	2.922.131.717	12 laporan	3.284.095.842	12 laporan	3.350.583.508	12 laporan	3.507.414.144	
	4.01.02.2.14.0002 Fasillitasi Komunikasi Pimpinan				14.194.037.448		15.025.667.537		15.387.631.661		15.454.119.327		15.610.949.962	
	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 laporan	12 laporan	14.194.037.448	12 laporan	15.025.667.537	12 laporan	15.387.631.661	12 laporan	15.454.119.327	12 laporan	15.610.949.962	
	4.01.02.2.14.0003				7.297.629.536		8.129.259.625		8.491.223.750		8.557.711.417		8.714.542.052	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 laporan	12 laporan	7.297.629.536	12 laporan	8.129.259.625	12 laporan	8.491.223.750	12 laporan	8.557.711.417	12 laporan	8.714.542.052	
Bagian Keuangan				48.286.218.031		50.688.296.098		53.213.649.706		55.898.295.351		58.664.296.346	
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				48.286.218.031		50.688.296.098		53.213.649.706		55.898.295.351		58.664.296.346	
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas	100 %	100 %	48.286.218.031	100 %	50.688.296.098	100 %	53.213.649.706	100 %	55.898.295.351	100 %	58.664.296.346	
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.288.600		8.778.000		9.220.000		9.697.000		10.155.000	
Tersedianya dokumen administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang dihasilkan	100 %	100 %	8.288.600	100 %	8.778.000	100 %	9.220.000	100 %	9.697.000	100 %	10.155.000	
4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				725.300		762.000		800.000		840.000		885.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	725.300	1 dokumen	762.000	1 dokumen	800.000	1 dokumen	840.000	1 dokumen	885.000	
		4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.085.500		1.140.000		1.200.000		1.257.000		1.320.000	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.085.500	1 dokumen	1.140.000	1 dokumen	1.200.000	1 dokumen	1.257.000	1 dokumen	1.320.000	
		4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.624.300		2.776.000		2.920.000		3.100.000		3.250.000	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.624.300	1 dokumen	2.776.000	1 dokumen	2.920.000	1 dokumen	3.100.000	1 dokumen	3.250.000	
		4.01.01.2.01.0005				3.853.500		4.100.000		4.300.000		4.500.000		4.700.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome		Indikator Outcome/Output	Baseline 2024										Ket
Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030	
Sub Kegiatan/Output				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3.853.500	1 dokumen	4.100.000	1 dokumen	4.300.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	4.700.000	
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					47.338.616.431		49.705.205.098		52.190.116.706		54.799.285.351		57.539.828.346	
Terlaksananya administrasi keuangan Sekretariat Daerah		Persentase administrasi keuangan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	46.236.472.131	100 %	48.547.920.098	100 %	50.974.936.706	100 %	53.523.300.351	100 %	56.199.078.346	
Tersedianya dokumen pelaporan keuangan Sekretariat Daerah		Persentase dokumen pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	1.102.144.300	100 %	1.157.285.000	100 %	1.215.180.000	100 %	1.275.985.000	100 %	1.340.750.000	
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					46.236.472.131		48.547.920.098		50.974.936.706		53.523.300.351		56.199.078.346	
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	203 orang	280 orang	46.236.472.131	280 orang	48.547.920.098	280 orang	50.974.936.706	280 orang	53.523.300.351	280 orang	56.199.078.346	
4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas					1.100.000.000		1.155.000.000		1.212.750.000		1.273.400.000		1.338.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1.100.000.000	1 dokumen	1.155.000.000	1 dokumen	1.212.750.000	1 dokumen	1.273.400.000	1 dokumen	1.338.000.000	
		4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				318.100		335.000		360.000		400.000		450.000	
		Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	318.100	1 laporan	335.000	1 laporan	360.000	1 laporan	400.000	1 laporan	450.000	
		4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.617.400		1.700.000		1.800.000		1.900.000		2.000.000	
		Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	12 laporan	2 laporan	1.617.400	2 laporan	1.700.000	2 laporan	1.800.000	2 laporan	1.900.000	2 laporan	2.000.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
Kegiatan/Output			2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	nan/Semesteran SKPD												
4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				208.800		250.000		270.000		285.000		300.000	
Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	208.800	1 dokumen	250.000	1 dokumen	270.000	1 dokumen	285.000	1 dokumen	300.000	
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				700.000.000		735.000.000		775.000.000		850.000.000		875.000.000	
Tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	100 %	100 %	700.000.000	100 %	735.000.000	100 %	775.000.000	100 %	850.000.000	100 %	875.000.000	
4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				700.000.000		735.000.000		775.000.000		850.000.000		875.000.000	
Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	700.000.000	3 laporan	735.000.000	3 laporan	775.000.000	3 laporan	850.000.000	3 laporan	875.000.000	
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala				239.313.000		239.313.000		239.313.000		239.313.000		239.313.000	

Bidang urusan/Program/ Outcome			Indikator Outcome/Output	Baseline 2024											Ket
	Kegiatan/Output				2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan/Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
	Terlaksananya administrasi keuangan KDH dan WKDH		Presentase Administrasi Keuangan KDH dan WKDH	100 %	100 %	239.313.000	100 %	239.313.000	100 %	239.313.000	100 %	239.313.000	100 %	239.313.000	
		4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				239.313.000		239.313.000		239.313.000		239.313.000		239.313.000	
		Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 orang	2 orang	239.313.000	2 orang	239.313.000	2 orang	239.313.000	2 orang	239.313.000	2 orang	239.313.000	

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, maka diperlukan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program-program unggulan yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan saat proses pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi prioritas bagi Perangkat Daerah. Berikut ini merupakan tabel program prioritas Sekretariat Daerah Kota Semarang yang diselaraskan dengan program prioritas pada Dokumen RPJMD Kota Semarang yang disusun dengan keterkaitan antara program prioritas, outcome, kegiatan, dan sub kegiatan.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Sekretariat Daerah Kota Semarang

Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang	Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
3	Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan)	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Kegiatan Penataan Organisasi	
	Membangun sistem pemerintahan yang fleksibel, gesit, dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
4	Menambah penerimaan dana operasional Marbot, Penjaga rumah ibadah lainnya, TPA, Guru modin dan Guru Keagamaan lainnya	Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
	Memberikan umroh dan perjalanan religi gratis bagi Masyarakat, Bimbingan belajar dan Lembaga pembelajaran Al-quran gratis yang tersedia di setiap kelurahan serta supporting penyelenggaraan MTQ tingkat nasional		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Spiritual	

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan

merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Indikator Tujuan:**								
a	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	74,09	75,89	77,69	79,49	81,29	83,09	
b	Nilai Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Nilai	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	92,50	
c	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,48	4,52	4,56	4,60	4,64	4,66	
2	**Indikator Sasaran:**								
a	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,92	98,03	98,12	98,33	98,42	98,52	
b	Nilai EKPPD	Nilai	3,62	3,71	3,80	3,89	3,99	4,08	
c	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berstatus kinerja baik	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
d	Tingkat efektivitas	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat								
e	Persentase meningkatnya kinerja BUMD dari aspek layangan dan keuangan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
f	Tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi Pembangunan	Persentase	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	92,50%	
g	Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR	Urusan	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	
h	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
i	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	89,60	89,70	89,80	89,90	90,00	90,10	
j	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kota)	Indeks	90,65	90,70	90,75	90,80	90,85	90,90	
k	Persentase peningkatan nilai kepuasan pimpinan daerah	Persentase	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	
l	Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
m	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan kota dan Sekretariat Daerah	Persentase	85 %	86 %	87 %	88 %	88 %	89 %	

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

4.3 Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	89,94	90,66	91,39	92,12	92,85	93,57	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,65	90,7	90,75	90,8	90,85	90,9	
3	Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	74,09	75,89	77,69	79,49	81,29	83,09	
4	Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,62	3,71	3,8	3,89	3,99	4,08	
5	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Persentase	6,03	6,04	6,04	6,05	6,05	6,05	
6	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	
7	*Return on Asset* (RoA) BUMD	Persentase	4,58	5,18	5,79	6,39	6,99	7,59	
8	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persentase	60	60,87	61,74	62,61	63,48	64,35	
9	Total Kredit/ PDRB	Persentase	41	43,47	45,95	48,42	50,89	53,36	

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Sekretariat Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan penunjang dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Permasalahan belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan system pelayanan public yang inklusif dan berdaya guna sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugasnya secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

29. SEKRETARIAT DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang maka Sekretariat DPRD wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat DPRD beserta pemangku kepentingan terkait dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya Bidang Legislasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
c. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
d. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang.

BAB IIITujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tentang tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. .

BAB IVRencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Semarang mendasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta sistem kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagai berikut

a. Tugas Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

b. Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas sekretariat DPRD Kota Semarang menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Sekretariat DPRD;
5. penyelenggaraan kerjasama Bagian Persidangan dan PerundangUndangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Sekretariat DPRD;
7. penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
8. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
9. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta sistem kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

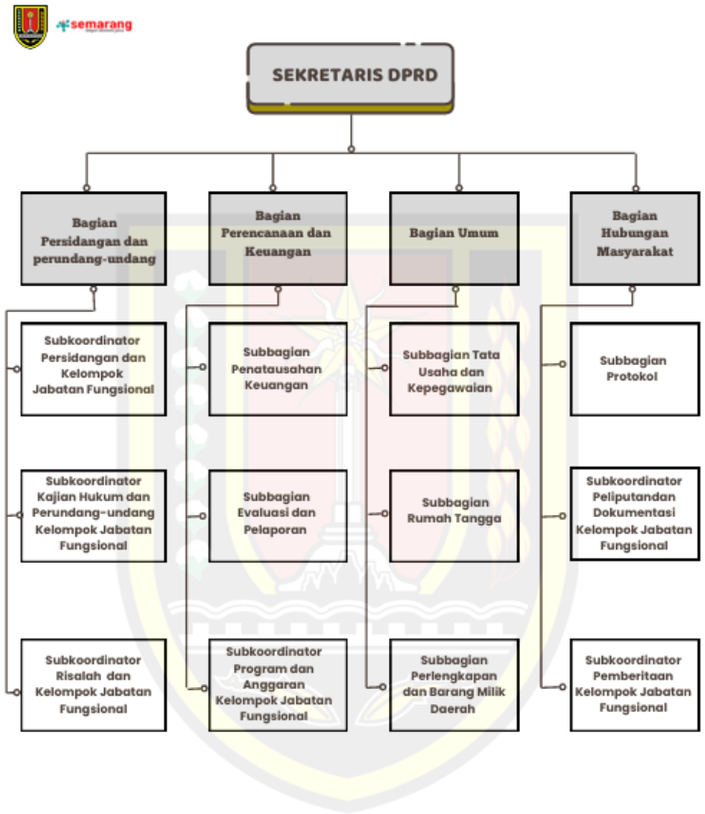

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Semaang

d. Uraian Tugas dan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta sistem kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Persidangan, Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, dan Risalah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
e. pelaksanaan kegiatan Persidangan, Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, dan Risalah;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;

g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Program dan Anggaran, Penatausahaan Keuangan, dan Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah.Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Umum;
e. pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Bagian Umum;
g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Umum;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbagian Pemberitaan, Subbagian Peliputan dan Dokumentasi, dan Subbagian Protokol. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Hubungan Masyarakat;
e. pelaksanaan kegiatan pemberitaan, peliputan dan dokumentasi, dan Subbagian Protokol;
f. pelaksanaankegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Bagian Hubungan Masyarakat;
g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Hubungan Masyarakat;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Awal September 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 50 pegawai yang terdiri dari 25 pegawai laki-laki (50%) dan 25 pegawai perempuan (50%) .

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Sekretariat DPRD Kota Semarang mayoritas memiliki tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 24 pegawai (48%), untuk pendidikan S2 sebanyak 14 pegawai (28%), Diploma III sebanyak 7 pegawai (14%) dan jenjang SMA sebanyak 5 pegawai (10%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan digram berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Sekretariat DPRD
Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	ASN	
		Jumlah Pegawai	Persentase terhadap seluruh pegawai
1	S2	14	28%
2	S1	24	48%
3	D3	7	14%
4	SMA	5	10%
Jumlah		49	100,00%
Jumlah ASN		49 pegawai	

Sumber : Sekretariat DPRD per 1 Juli 2025

Selanjutnya pegawai ASN bila dilihat dari golongan terdiri dari 38 PNS dan 11 PPPK. Pegawai golongan IV sebanyak 5 pegawai, pegawai golongan III sebanyak 27 pegawai dan pegawai golongan II sebanyak 6

pegawai. Selain itu terdapat pegawai PPPK dengan rincian golongan IX sebanyak 7 pegawai dan PPPK golongan VII sebanyak 4 pegawai. Secara rinci kondisi jumlah pegawai ASN berdasarkan Golongan di Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan di Sekretariat DPRD
Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
A	PNS	39	78%
1	Golongan IV	5	10 %
	IV/c	1	2%
	IV/b	2	4%
	IV/a	5	10%
2	Golongan III	27	54%
	III/d	4	8%
	III/c	6	12%
	III/b	6	12%
	III/a	9	18%
3	Golongan II	6	12%
	II/d	1	2%
	II/c	5	10%
B	PPPK	11	22%
1	IX	7	14%
2	VII	2	4%
3	V	2	4%

Sumber : Sekretariat DPRD per 1 Juli 2025

b. Sarana dan Prasarana (Asset)

Secara keseluruhan kepemilikan asset oleh sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 sejumlah 898 jenis asset, dari keseluruhan tersebut dilihat dari kondisinya terdapat asset yang dalam kondisi baik dan juga ada asset yang perlu perbaikan-perbaikan. Uraian mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DRPD Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rincian Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Sekretariat DPRD

No	Kode	Keterangan	Total
1	1.3.2.05.002.006.017	Mic Conference	61
2	1.3.2.10.001.002.009	Tablet PC	61
3	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	56
4	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	49
5	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43
6	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	37

No	Kode	Keterangan	Total
7	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	30
8	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	26
9	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	23
10	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	21
11	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	18
12	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	17
13	1.3.2.02.002.002.001	Sepeda	16
14	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	16
15	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	16
16	1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16
17	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15
18	1.3.2.05.003.006.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	14
19	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	13
20	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	9
21	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	9
22	1.3.2.06.001.002.061	Lensa Kamera	8
23	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	8
24	1.3.2.06.001.002.164	Alat Studio Video Lainnya	8
25	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	7
26	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	7
27	1.3.2.05.001.005.034	Display	7
28	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	7
29	1.3.2.05.002.006.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7
30	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	7
31	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	6
32	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	6
33	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	6
34	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6
35	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	6
36	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	5
37	1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	5
38	1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	5

No	Kode	Keterangan	Total
39	1.3.2.05.003.002.011	Meja Tamu Biasa	5
40	1.3.2.06.001.002.126	Camera Digital	5
41	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	4
42	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	4
43	1.3.2.05.002.001.016	Meja Tambahan	4
44	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	4
45	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	4
46	1.3.2.05.002.006.020	Stabilisator	4
47	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	4
48	1.3.2.05.003.006.003	Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD	4
49	1.3.2.10.002.001.018	peralatan mainframe lainnya (dst)	4
50	1.3.2.10.002.002.010	Computer Compatible	4
51	1.3.2.05.001.003.007	Mesin Fotocopy Folio	3
52	1.3.2.05.001.003.017	Alat Reproduksi lainnya	3
53	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	3
54	1.3.2.05.001.005.019	Alat Pemotong Kertas	3
55	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	3
56	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	3
57	1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	3
58	1.3.2.05.002.006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3
59	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	3
60	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3
61	1.3.2.05.003.007.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3
62	1.3.2.06.001.001.036	Microphone/Wireless MIC	3
63	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3
64	1.3.2.06.001.002.045	Tripod Camera	3
65	1.3.2.07.002.005.025	Alat Kesehatan Umum lainnya	3
66	1.3.2.10.002.004.001	Server	3
67	1.3.2.01.003.007.001	Mobil Workshop	2
68	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2
69	1.3.2.05.001.002.012	Mesin Penghitung Uang	2
70	1.3.2.05.001.004.020	Lemari Display	2

No	Kode	Keterangan	Total
71	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	2
72	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2
73	1.3.2.05.002.004.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2
74	1.3.2.05.002.006.015	Microphone Floor Stand	2
75	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2
76	1.3.2.05.003.001.003	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2
77	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
78	1.3.2.05.003.002.008	Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD	2
79	1.3.2.05.003.002.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	2
80	1.3.2.05.003.003.003	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2
81	1.3.2.05.003.004.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	2
82	1.3.2.05.003.005.003	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2
83	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2
84	1.3.2.06.001.001.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	2
85	1.3.2.06.001.002.034	Teleprompter	2
86	1.3.2.06.001.002.044	Digital Video Effect	2
87	1.3.2.06.001.002.060	Camera Film	2
88	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	2
89	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2
90	1.3.2.10.001.001.008	Komputer Jaringan lainnya	2
91	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2
92	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	1
93	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	1
94	1.3.2.03.002.001.005	R O L	1
95	1.3.2.03.002.003.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1
96	1.3.2.03.002.012.028	Mesin Bor Listrik Tangan	1
97	1.3.2.04.001.005.004	Alat Pengukur Temperatur	1
98	1.3.2.05.001.001.004	Mesin Ketik Listrik	1
99	1.3.2.05.001.002.001	Mesin Hitung Manual	1
100	1.3.2.05.001.005.008	Copy Board/Elektric White Board	1
101	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	1
102	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	1

No	Kode	Keterangan	Total
103	1.3.2.05.001.005.032	White Board Electronic	1
104	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	1
105	1.3.2.05.001.005.078	Papan Tulis	1
106	1.3.2.05.002.001.012	Meja Telepon	1
107	1.3.2.05.002.001.013	Meja Podium	1
108	1.3.2.05.002.001.017	Meja Panjang	1
109	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	1
110	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	1
111	1.3.2.05.002.002.001	Jam Mekanis	1
112	1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
113	1.3.2.05.002.003.007	Alat Pembersih lainnya	1
114	1.3.2.05.002.004.002	A.C. Sentral	1
115	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	1
116	1.3.2.05.002.004.015	Alat Pendingin lainnya	1
117	1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	1
118	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	1
119	1.3.2.05.002.006.014	Microphone	1
120	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	1
121	1.3.2.05.002.006.033	Pataka	1
122	1.3.2.05.002.006.039	Mimbar/Podium	1
123	1.3.2.05.002.006.068	Tangga	1
124	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1
125	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
126	1.3.2.05.003.002.003	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	1
127	1.3.2.05.003.002.004	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
128	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
129	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
130	1.3.2.05.003.004.003	Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	1
131	1.3.2.05.003.004.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1
132	1.3.2.05.003.004.005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1
133	1.3.2.06.001.001.001	Audio Mixing Console	1
134	1.3.2.06.001.001.035	Modulation Monitor Speaker Kabaret	1

No	Kode	Keterangan	Total
135	1.3.2.06.001.001.037	Microphone/Boom Stand	1
136	1.3.2.06.001.001.042	Audio Master Control Unit	1
137	1.3.2.06.001.001.064	Chairman/Audio Conference	1
138	1.3.2.06.001.001.075	Digital Audio Taperecorder	1
139	1.3.2.06.001.001.078	Microphone Cable	1
140	1.3.2.06.001.002.015	Video Mixer	1
141	1.3.2.06.001.002.024	Video Processor	1
142	1.3.2.06.001.002.053	DC Converter	1
143	1.3.2.06.001.002.128	Lampu Blitz Kamera	1
144	1.3.2.06.001.002.130	Video Conference	1
145	1.3.2.06.001.004.003	Mesin Cetak Listrik Sheet	1
146	1.3.2.06.001.004.014	Mesin Jilid	1
147	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	1
148	1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	1
149	1.3.2.06.002.001.022	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1
150	1.3.2.06.002.002.004	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1
151	1.3.2.06.002.006.003	Slide Projector (Lapangan)	1
152	1.3.2.08.001.011.018	Vacum Pump	1
153	1.3.2.08.007.003.001	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1
154	1.3.2.09.004.009.135	Set of Studio Lights	1
155	1.3.2.10.001.003.001	Komputer Unit Lainnya	1
156	1.3.2.10.002.001.006	CPU (Peralatan Mainframe)	1
157	1.3.2.10.002.001.013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1
158	1.3.2.10.002.002.017	Peralatan Minikomputer lainnya	1
159	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	1
160	1.3.2.10.002.003.017	External/ Portable Hardisk	1
161	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	1
162	1.3.2.10.002.004.004	Modem	1
163	1.3.2.10.002.004.033	Peralatan Jaringan lainnya	1
164	1.3.2.15.004.005.006	Air Conditioning (AC)	1

Sumber : Sekretariat DPRD per 1 Juli 2025

Selain pada inventarisasi sarana dan prasarana milik Sekretariat DPRD Kota Semarang, peninjauan aset dinas juga dilakukan pada aset tanah

dan bangunan yang dimiliki. Berikut merupakan tabel aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Tabel 2.4

Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang

JENIS BARANG	KONDISI	LUAS LANTAI	ALAMAT	STATUS	ASAL USUL	HARGA
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Pemuda No.146, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132	Milik Pemda		

2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang:

a. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pendukung yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Indikator Tujuan/Sasaran Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026**																
1.	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	%	90	90	95	95	95	88,61	89,72	80	87,51	90	98,46%	99,69%	94,39%	92,12%	94,74%
2.	Persentase Raperda menjadi Perda	%	76.47	82.35	88.35	94.12	94.12	65,75	63,33	53,33	62,5	62,5	85,98%	76,90%	60,36%	66,40%	66,40%
3.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	77,94	79,94	81	82	82	72,25	72,98	73,86	77,15	79,1	92,70%	91,29%	91,19%	91,22%	93,06%
B	**IKD RPJMD dan IKU Sekretariat DPRD**																

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
C	**Indikator Program Sekretariat DPRD**																
1.	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	dokumen	12	14	14	14	14	8	10	3	9	8	66,67%	71,42%	21,43%	64,28%	57,14%
2.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD																
4.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat DPRD Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Sekretariat DPRD. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD:

Tabel 2. 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SEKRETARIAT DPRD	**106.853.888.979**	**110.584.942.044**	**115.222.268.665**	**109.634.147.228**	**135.206.559.595**	**76.828.235.002**	**78.401.083.512**	**97.741.272.977**	**95.945.704.838**	**105.019.523.699**	**71,90 %**	**70,70 %**	**84,83 %**	**87,51 %**	**77,67 %**	**10,23%**	**34%**
4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	45.391.800.875	52.017.465.022	51.471.664.203	41.328.850.638	60.335.866.803	22.148.982.888	25.194.418.957	36.871.229.377	31.585.417.808	36.577.940.814	48,80 %	48,43 %	71,63 %	76,42 %	60,62 %	33,17%	62%
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	16.103.923.100	17.893.247.889	14.293.853.660	8.858.545.134	12.362.909.600	4.912.246.708	5.458.051.898	7.670.597.035	5.906.899.100	7.256.182.899	30,50 %	30,50 %	53,66 %	66,68 %	58,69 %	88,20%	51%
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	16.103.923.100	17.893.247.889	14.293.853.660	8.858.545.134	12.362.909.600	4.912.246.708	5.458.051.898	7.670.597.035	5.906.899.100	7.256.182.899	30,50 %	30,50 %	53,66 %	66,68 %	58,69 %	88,20%	51%
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	8.544.358.066	12.686.153.441	13.771.980.524	11.794.794.195	14.954.230.412	8.152.783.104	8.855.579.116	12.484.677.362	9.622.506.600	10.093.734.682	95,42 %	69,81 %	90,65 %	81,58 %	67,50 %	24,25%	32%
4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8.544.358.066	9.493.731.184	10.353.517.224	8.412.618.895	11.065.856.610	5.705.948.250	6.339.942.500	9.497.913.376	6.584.500.000	6.773.097.525	66,78 %	66,78 %	91,74 %	78,27 %	61,21 %	0,89%	33%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2868643620	3.187.381.800	2.618.463.300	2.620.575.300	2.875.632.584	2260427954	2.511.586.616	2.292.136.176	2.305.349.100	2.362.171.637	78,80%	78,80%	87,54%	87,97%	82,14%	4,96%	5%
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	195017000	5.040.457	800.000.000	761.600.000	1.012.741.218	186.406.900	4.050.000	694.627.810	732.657.500	958.465.520	95,58%	80,35%	86,83%	96,20%	94,64%	1,30%	16990%
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4457414618	4.952.682.909	6.078.067.368	6.463.633.544	5.201.587.411	3.184.799.031	3.538.665.590	5.803.083.470	6.339.924.120	4.713.838.762	71,45%	71,45%	95,48%	98,09%	90,62%	28,75%	59%
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	4457414618	4.952.682.909	6.078.067.368	6.463.633.544	5.201.587.411	3184799031	3.538.665.590	5.803.083.470	6.339.924.120	4.713.838.762	71,45%	71,45%	95,48%	98,09%	90,62%	28,75%	59%
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	16.286.105.091	16.485.380.783	17.327.762.651	14.211.877.765	27.817.139.380	5.899.154.045	7.342.122.353	10.912.871.510	9.716.087.988	14.514.184.471	36,22%	44,54%	62,98%	68,37%	52,18%	49,24%	112%
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.882.308.091	14.483.976.784	15.290.443.151	11.662.373.766	24.886.459.955	5.707.558.145	6.341.731.272	8.922.901.010	7.678.269.988	12.410.626.231	35,94%	43,78%	58,36%	65,84%	49,87%	43,68%	99%
4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	403.797.000	2.001.403.999	2.037.319.500	2.549.503.999	2.930.679.425	191.595.900	1.000.391.081	1.989.970.500	2.037.818.000	2.103.558.240	47,45%	49,98%	97,68%	79,93%	71,78%	72,39%	527%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.462.088.105	58.867.477.022	63.750.604.462	68.305.296.590	74.870.692.792	54.679.252.113	53.206.664.555	60.870.043.600	64.360.287.030	68.441.582.885	88,96%	90,38%	95,48%	94,22%	91,41%	2,94%	24%
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.225.000	66.851.855	35.214.620	33.012.494	82.424.800	76.339.500	48.737.350	18.816.050	30.735.700	73.014.100	83,68%	72,90%	53,43%	93,10%	88,58%	29,80%	103%
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.968.000	14.339.880	10.000.000	10.128.674	39.063.200	19.393.000	11.770.000	8.307.300	10.092.000	38.373.600	92,49%	82,08%	83,07%	99,64%	98,23%	8,49%	233%
4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.599.250	5.940.937	3.220.880	3.117.280	3.033.800	7.629.875	2.970.250	1.255.000	3.112.000	2.977.500	88,73%	50,00%	38,96%	99,83%	98,14%	88,80%	25%
4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.599.250	5.940.937	3.213.562	3.199.030	3.033.800	7.629.875	4.523.000	1.728.000	3.194.000	2.930.000	88,73%	76,13%	53,77%	99,84%	96,58%	38,84%	-26%
4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.599.250	5.863.599	9.877.380	8.392.480	8.316.600	7.629.875	5.691.000	2.501.750	6.649.500	105.000	88,73%	97,06%	25,33%	79,23%	1,26%	49,90%	-14%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.599.250	5.940.937	3.213.562	3.199.030	3.033.800	7.629.875	4.826.500	1.948.000	3.194.000	2.979.800	88,73%	81,24%	60,62%	99,84%	98,22%	29,26%	-39%
4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.570.000	18.862.020	3.777.716	3.064.480	3.033.800	23.710.000	16.317.000	2.976.000	2.654.300	2.975.400	86,00%	86,51%	78,78%	86,62%	98,08%	14,84%	-112%
4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8.290.000	9.963.545	1.911.520	1.911.520	22.909.800	2.717.000	2.639.600	100.000	1.839.900	22.672.800	32,77%	26,49%	5,23%	96,25%	98,97%	1643,30%	2773%
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7250405202	7.836.587.944	6.977.110.529	7.258.572.348	7.620.670.210	6951910096	7.301.504.785	6.639.794.551	6.889.484.032	7.415.692.602	95,88%	93,17%	95,17%	94,92%	97,31%	1,57%	7%
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6932765202	7.297.647.581	6.614.620.977	6.934.719.086	7.255.195.000	6653822596	7.004.023.785	6.317.148.551	6.585.510.032	7.101.358.102	95,98%	95,98%	95,50%	94,96%	97,88%	2,01%	8%
4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	317.640.000	538.940.363	362.489.552	321.351.982	363.095.610	298.087.500	272.481.000	322.646.000	301.870.000	312.507.500	93,84%	50,56%	89,01%	93,94%	86,07%	27,08%	7%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0	1.008.000	1.055.000	-	-	-	932.000	526.800	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92,46%	49,93%	#DIV/0!	#DIV/0!
4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	0	1.493.280	1.324.600	-	-	-	1.172.000	1.300.200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	78,48%	98,16%	#DIV/0!	#DIV/0!
4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	50.000.000	70.000.000	0	0	0	48.000.000	52.412.500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,00%	74,88%	#DIV/0!	#DIV/0!
4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	50.000.000	70.000.000	-	-	-	48.000.000	52.412.500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,00%	74,88%	#DIV/0!	#DIV/0!
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.000.000	217.000.000	423.300.000	453.000.000	723.000.000	209.680.000	192.700.000	353.650.000	321.970.000	527.603.000	67,21%	88,80%	83,55%	71,08%	72,97%	13,96%	130%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	312.000.000	217.000.000	423.300.000	453.000.000	723.000.000	209.680.000	192.700.000	353.650.000	321.970.000	527.603.000	67,21%	88,80%	83,55%	71,08%	72,97%	13,96%	130%
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.692.697.458	4.257.825.293	5.672.559.792	6.528.293.330	5.968.756.171	3.130.667.675	3.120.071.690	4.712.044.207	5.365.008.062	5.288.766.467	66,71%	73,28%	83,07%	82,18%	88,61%	29,95%	63%
4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.268.000	50.265.900	50.000.000	50.000.000	110.000.000	50.175.970	45.649.650	45.431.000	48.389.500	109.184.160	99,82%	90,82%	90,86%	96,78%	99,26%	0,11%	123%
4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	394466452,8	415.227.845	417.627.845	417.627.845	407.327.845	289698415	304.945.700	357.307.195	370.158.082	384.482.052	73,44%	73,44%	85,56%	88,63%	94,39%	26,59%	30%
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	544743281	573.413.980	473.413.980	390.162.872	473.413.980	294136382,8	309.617.245	388.395.340	312.345.350	413.697.213	54,00%	54,00%	82,04%	80,06%	87,39%	58,68%	44%
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	186.133.000	214.999.700	310.797.400	323.617.400	427.664.450	171.260.500	149.868.500	197.127.000	250.280.690	329.211.000	92,01%	69,71%	63,43%	77,34%	76,98%	-11,78%	78%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	353.216.000	357.646.268	274.080.551	339.944.180	241.792.596	307.498.000	197.985.365	210.159.854	220.728.600	213.554.077	87,06 %	55,36 %	76,68 %	64,93 %	88,32 %	22,81%	-28%
4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.256.485.000	1.638.665.240	1.894.577.156	3.300.661.353	2.877.987.240	1.618.054.183	1.631.072.270	1.865.213.300	3.031.512.548	2.864.533.560	71,71 %	99,54 %	98,45 %	91,85 %	99,53 %	39,38%	72%
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	907.385.724	1.008.206.360	2.252.062.860	1.706.279.680	1.430.570.060	399.844.224	444.271.360	1.648.410.518	1.131.593.292	974.104.405	44,07 %	44,07 %	73,20 %	66,32 %	68,09 %	59,38%	237%
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.550.586.055	2.597.881.790	3.946.381.849	1.867.505.673	4.479.776.412	2.405.764.707	2.008.252.000	3.694.481.220	1.680.706.064	4.037.677.000	67,76 %	77,30 %	93,62 %	90,00 %	90,13 %	31,48%	153%
4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.268.055.000	550.650.000	1.197.076.729	604.880.552	3.293.655.428	848.151.850	501.288.000	1.184.760.000	582.458.586	2.924.440.000	66,89 %	91,04 %	98,97 %	96,29 %	88,79 %	34,32%	447%
4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	755243055	839.158.950	2.040.323.572	996.878.892	732.076.596	459123300	510.137.000	1.825.813.220	848.844.478	689.280.000	60,79 %	60,79 %	89,49 %	85,15 %	94,15 %	52,93%	197%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.527.288.000	1.208.072.840	708.981.548	265.746.229	454.044.388	1.098.489.557	996.827.000	683.908.000	249.403.000	423.957.000	71,92%	82,51%	96,46%	93,85%	93,37%	28,41%	-34%
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.451.700.000	2.610.431.256	2.555.963.367	2.637.714.256	2.634.555.949	6.129.235.670	2.301.572.210	2.454.188.963	2.564.791.707	2.555.173.466	82,25%	88,17%	96,02%	97,24%	96,99%	17,11%	-52%
4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.914.000	12.145.000	28.445.000	20.000.000	22.477.693	7.800.000	11.130.000	21.730.000	19.990.000	22.460.000	87,50%	91,64%	76,39%	99,95%	99,92%	18,90%	142%
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.807.000	167.162.256	167.162.256	152.462.256	167.162.256	91.113.540	63.903.456	87.854.711	91.186.707	91.913.466	44,27%	38,23%	52,56%	59,81%	54,98%	29,56%	12%
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.236.979.000	2.431.124.000	2.360.356.111	2.465.252.000	2.444.916.000	6.030.322.130	2.225.538.754	2.344.604.252	2.453.615.000	2.440.800.000	83,33%	91,54%	99,33%	99,53%	99,83%	18,87%	-54%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3010341748	2.523.974.826	2.215.350.560	1.996.378.090	2.344.516.110	2386232316	1.549.813.193	1.859.232.958	1.776.811.499	1.793.723.397	79,27%	61,40%	83,93%	89,00%	76,51%	6,15%	-19%
4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1055777148	1.111.344.366	890.000.000	938.500.000	1.063.500.000	563830892,9	593.506.203	697.808.939	793.133.050	679.758.462	53,40%	53,40%	78,41%	84,51%	63,92%	30,23%	22%
4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.000.000	340.014.560	340.014.560	269.693.340	333.577.247	61.640.000	214.922.600	250.072.000	234.166.670	230.535.450	97,84%	63,21%	73,55%	86,83%	69,11%	-21,39%	257%
4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	503355600	559.284.000	561.044.000	561.044.000	636.649.000	484277481	538.086.090	544.923.362	541.463.079	598.511.945	96,21%	96,21%	97,13%	96,51%	94,01%	-2,27%	22%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.388.209.000	513.331.900	424.292.000	227.140.750	310.789.863	1.276.483.942	201.295.100	366.428.657	208.048.700	284.917.540	91,95%	39,21%	86,36%	91,59%	91,68%	69,03%	-8%
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3343586 1622	37.306.957.358	39.992.343.101	45.592.320.399	49.058.493.140	31.764.068.541	35.541.845.828	39.776.322.651	43.803.584.987	45.264.996.872	95,00%	95,27%	99,46%	96,08%	92,27%	-2,68%	37%
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	3269406 1593	36.326.735.103	39.083.500.131	44.449.962.864	47.879.959.000	31.059.358.513	34.838.503.013	39.016.364.751	42.942.301.987	44.311.161.872	95,00%	95,90%	99,83%	96,61%	92,55%	-2,39%	37%
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	7418000 29,5	824.222.255	908.842.970	1.142.357.535	1.178.534.140	704.710.028	593.845.000	759.957.900	861.283.000	953.835.000	95,00%	72,05%	83,62%	75,40%	80,93%	-10,59%	36%
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	108.229.000	156.000.000	-	-	-	108.229.000	109.497.815	-	-	-	100,00%	70,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	1.667.271.020	1.149.966.700	1.932.380.644	1.888.500.000	1.888.500.000	1.625.353.609	1.144.167.499	1.361.513.000	1.879.194.979	1.432.523.481	97,49%	99,50%	70,46%	99,51%	75,86%	-9,66%	4%
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.667.271.020	1.149.966.700	1.932.380.644	1.888.500.000	1.888.500.000	1.625.353.609	1.144.167.499	1.361.513.000	1.879.194.979	1.432.523.481	97,49%	99,50%	70,46%	99,51%	75,86%	-9,66%	4%

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2025

c. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam penyelengaraan tugas dan fungsi diantaranya

1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dalam laman ini memuat informasi terkait dengan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Peraturan DPRD yang dapat diakses pada alamat https://jdih.dprd.semarangkota.go.id
2) Dhayoh-e merupakan Aplikasi yang dibuat Sebagai Media Komunikasi Digital DPRD Kota Semarang dengan DPRD Kabupaten / Kota Dan Instansi pemerintah Se Indonesia. Tentunya hal ini memudahkan dalam mengatur dan mengetahui kehadiran tamu yang akan berkunjung ke DPRD Kota Semarang secara sistematis
3) Secara rutin DPRD Kota Semarang menyapa masyarakat lewat media cetak, media online, radio, dan televisi . Dalam beberapa kesempatan tersebut, DPRD Kota Semarang mengangkat issue yang sedang hangat di masyaraka. Misalnya permasalahan Pendidikan, Kesehatan dan Pemahanan terhadap fungsi Legislatif. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka. Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

d. Penghargaan Perangkat Daerah

Pada bulan Juli Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 ini memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Kedua Tingkat Jawa Tengah dalam Lomba Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Drs. Nana Sudjana, A.S didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron, S.H., M.H.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi memfasilitasi pelaksanaan Tugas DPRD, Tantangan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1) Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengabdian secara penuh bagi Anggota DPRD yang terpilih dalam pemilihan 2024. Tentunya program-program dan janji-janji politik dalam kampanye berusaha untuk direalisasikan. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk pelaksanaannya.
2) Selain itu, pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Serentak Tahun 2024 juga akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini

tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk dalam pelaksanaan janji-janji politik Kepala Daerah.

3) Perkembangan Kota Semarang sebagai salah satu Kota Besar di Indonesia tentunya harus diikuti dengan regulasi-regulasi yang mendukung iklim investasi sehingga memudahkan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi memfasilitasi pelaksanaan Tugas DPRD, Peluang Sekretariat DPRD sebagai berikut

1) Dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang berpeluang untuk meningkat secara signifikan. Hal ini karena selisih lebih dari anggaran perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu faktor dominan silpa akan termaksimalkan dalam penyerapan;
2) Periode baru 2024-2029 diharapkan membawa semangat baru bagi DPRD Kota Semarang dalam mewakili masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat;
3) Pengoptimalan fungsi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang. Terdokumentasikannya peraturan-peraturan yang sistematis dan lengkap merupakan salah satu indikator tercapainya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kota Semarang. Sehingga harapannya adalah JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang mendapat penghargaan dalam pengelolaan JDIH tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta sistem kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Sekretariat DPRD, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Semarang yaitu “Belum optimalnya kapasitas kinerja Anggota DPRD” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rumusan Masalah Sekretariat DPRD

No	Masalah Utama OPD	Permasalahan OPD	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kapasitas kinerja Anggota DPRD	Belum optimalnya penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan	• Belum optimalnya penyelenggaraan persidangan • Belum optimal kualitas kajian hukum dan perundang-undangan • Belum optimalnya kualitas risalah

No	Masalah Utama OPD	Permasalahan OPD	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan	• Belum optimalnya kinerja penatausahaan keuangan • Belum optimalnya kinerja perencanaan keuangan • Belum optimalnya kinerja evaluasi dan pelaporan
		Belum optimalnya penyelenggaraan layanan umum	• Belum optimalnya kinerja tata usaha dan kepegawaian • Belum optimalnya kinerja rumah tangga • Belum optimalnya kinerja pengelolaan Aset dan BMD
		Belum optimalnya penyelenggaraan layanan kehumasan	• Belum optimalnya kinerja publikasi dan dokumentasi • Belum optimalnya kinerja keprotokolan • Belum optimalnya kualitas kinerja pemberitaan

Berdasarkan uraian diatas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan layanan Sekretariat DPRD dapat dirincikan bahwa terdapat 4 permasalahan OPD dengan 12 Akar masalah.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045," Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Di dalam RPJMN dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita.

Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta),” disebutkan dalam lampiran Perpres 12/ 2025.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Wali Kota

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota

Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"**Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif**"

Pokok Visi keempat : Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif

Misi Ketujuh : Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas

Tujuan ketujuh : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat .

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sekretariat DPRD secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

c. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang.

Dalam konteks tata kelola kelembagaan di Kota Semarang, permasalahan strategis belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, termasuk DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pelayanan yang belum maksimal juga menimbulkan risiko ketidakadilan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta potensi penyalahgunaan wewenang.

Isu strategis dalam KLHS perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demokratis, dan bertanggung jawab. Prinsip good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum yang harus diwujudkan secara konsisten dalam tata kelola kelembagaan DPRD maupun Sekretariat DPRD. Meskipun tidak

secara langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat umum, kualitas kerja Sekretariat DPRD sangat menentukan efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tiga fungsi utamanya: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi ini merupakan instrumen sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang akuntabel.

Program/kegiatan strategis yang perlu menjadi prioritas dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang untuk menjawab isu tata kelola kelembagaan adalah sebagai berikut :

1) Program: Penguatan Dukungan Legislasi yang Partisipatif dan Transparan.
2) Program: Peningkatan Kualitas Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan.
3) Program: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat DPRD.

2.2.3. Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan terhadap RPJMD Kota Semarang, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.8
Rumusan Isu Strategis Sekretariat DPRD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Nilai SAKIP Kota Semarang	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Manajemen pemerintahan perlu ditingkatkan	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab	Perkembangan Teknologi dan tata kelola keuangan global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	- Peningkatan teknis penyusunan produk hukum daerah - Peningkatan kelembagaan bagian perencanaan dan keuangan - Peningkatan kelembagaan bagian umum - Peningkatan komunikasi dan hubungan masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kota Semarang tahun 2025 -2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan / urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode 2021-2026 visi dan misi Sekretariat DPRD sesuai dengan visi dan misi RPJMD dan fungsi Sekretariat DPRD

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dan perencanaan strategis, tujuan dan sasaran Pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang di tetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sesuai gambaran tentang kontribusi Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. *Impact* tersebut harus memberi ultimate goal dan keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksanaan pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut

”Meningkatnya Kapasitas Kinerja Anggota DPRD”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Sekretariat DPRD Kota Semarang, yaitu ”Persentase Raperda menjadi Perda”. Indikator ini diukur dari prosentase Raperda yang diusulkan dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dalam mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator sasaran “Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD” yaitu ”Persentase Raperda yang disetujui DPRD. Indikator sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD” yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD”.

Indikator Persentase Raperda yang disetujui DPRD diukur dari persentase capaian Jumlah Raperda yang disetujui untuk dibahas oleh DPRD Kota Semarang. Indikator Nilai AKIP Sekretariat DPRD diukur dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian Kinerja sedangkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD diukur dengan penilaian sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan sekretariat DPRD. Nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan (anggota DPRD, staf ahli, maupun masyarakat) terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Indeks ini mencerminkan persepsi penerima layanan atas kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Adapun Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat											
	Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD		Persentase Raperda menjadi Perda	Persen	88,50%	88,90%	89,30%	89,50%	89,75%	89,80%	
		Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	Persen	80%	82%	83%	84%	85%	86%	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD	Angka	79,50	80,35	81,55	82,15	83,45	84,77	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Angka	94,50	95,60	95,75	96,25	96,5	96,75	

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O *(Strengths – Opportunity)* yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Sekretariat DPRD dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Tahapan Strategi Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	**TAHAP II (2027)**	**TAHAP III (2028)**	**TAHAP IV (2029)**	**TAHAP V (2030)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan pembenahan fundamental pada proses kerja internal dan memulai digitalisasi untuk efisiensi dasar	Mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi dan meningkatkan kapasitas SDM untuk memanfaatkannya	Mengintegrasikan sistem internal dengan eksternal dan memperkuat dukungan keahlian (substantif) kepada Anggota DPRD	Memanfaatkan data dan teknologi untuk mengoptimalkan kinerja layanan serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik	Memastikan semua sistem dan perbaikan yang telah dilakukan menjadi budaya kerja yang permanen dan berkelanjutan

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Sekretariat DPRD agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Sekretariat DPRD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas

pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Sekretariat DPRD. Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2025 – 2029 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualita, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas	• Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi. • Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan. • Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. • Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan sistem merit. • Pengembangan kota cerdas untuk pengelolaan kota berbasis data	• Peningkatan penyelenggaran persidangan • Peningkatan kualitas kajian hukum dan perundang-undangan • Peningkatan kualitas risalah • Peningkatan kinerja penatausahaan keuangan • Peningkatan kinerja perencanaan keuangan • Peningkatan kinerja evaluasi dan pelaporan • Peningkatan kinerja tata usaha dan kepegawaian • Peningkatan kinerja rumah tangga • Peningkatan kinerja pengelolaan Aset dan BMD • Peningkatan kinerja publikasi dan dokumentasi • Peningkatan kinerja keprotokolan • Peningkatan kualitas kinerja pemberitaan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat DPRD untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun *cascading* kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sekretariat DPRD

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD**				**Persentase Raperda menjadi Perda**		**Sekretaris DPRD**
		Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD			Persentase Raperda yang disetujui DPRD		Sekretaris DPRD
			Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan-undangan	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang dibahas	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Subkoordinator Hukum dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas pembahasan	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Staf Persidangan dan Perundang-undangan

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				rancangan peraturan daerah			
				Meningkatnya kualitas kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Staf Persidangan dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Subkoordinator Persidangan
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Staf Persidangan dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Staf Persidangan dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Subkoordinator Risalah
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Staf Persidangan dan Perundang-undangan

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
				Meningkatnya kualitas penyelenggaran Hubungan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Subkoordinator Pemberitaan
				Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Staf Hubungan Masyarakat
				Meningkatnya kualitas penyelenggaran publikasi dan dokumentasi DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Subkoordinator Peliputan dan Dokumentasi
				Terlasananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Staf Hubungan Masyarakat
				Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Kasubbag Protokol

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Staf Hubungan Masyarakat
			Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat		Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
				Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD		Sekretaris DPRD
					Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD		Sekretaris DPRD

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Program dan Anggaran
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya pelaporan kinerja Sekertariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Penatausahaan Keuangan

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Penatausahaan Keuangan

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kasubbag Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
			Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian sekretariat DPRD	4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bagian Umum
				Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kasubbag Perlengkapan dan BMD
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Staf Perlengkapan dan BMD

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terpenuhinya penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sarpras yang Berjalan Baik	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Perlengkapan dan BMD

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Perlengkapan dan BMD
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Perlengkapan dan BMD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Perlengkapan dan BMD
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Rumah Tangga
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Rumah Tangga
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Perlengkapan dan BMD
				Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Perlengkapan dan BMD

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Perlengkapan dan BMD
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Perlengkapan dan BMD
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD yang selesai ditindaklanjuti	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Rumah Tangga
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Rumah Tangga
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staf Rumah Tangga

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Rumah Tangga
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Rumah Tangga
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Rumah Tangga
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Rumah Tangga

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Operasional atau Lapangan			
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Rumah Tangga
				Terpeliharanya Sarana Prasana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Perlengkapan dan BMD
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Perlengkapan dan BMD
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf Perlengkapan dan BMD

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				atau Bangunan Lainnya			
				Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terlaksananya medical checkup DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Kasubbag Rumah Tangga
				Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Staf Rumah Tangga

Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD • 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah • 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD • 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD • 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli • 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat • 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat • 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD • 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD • 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Tugas DPRD • 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
2	Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya			

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang terdapat Tabel 4.3 berikut

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02 SEKRERTARIAT DPRD				**136.219.910.866**		**150.760.215.948**		**157.258.710.251**		**158.452.391.313**		**161.268.037.734**
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				**61.521.335.455**		**68.030.023.592**		**70.862.907.628**		**71.383.268.171**		**72.610.690.928**
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan-undangan		95,3	45.564.871.608	95,75	50.385.435.679	96,25	52.483.569.545	96,5	52.868.966.922	96,75	53.778.039.521
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				19.268.642.910		21.307.181.030		22.194.447.707		22.357.425.988		22.741.858.001
Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang dibahas	58,69 %	80,00 %	19.268.642.910	80,00 %	21.307.181.030	80,00 %	22.194.447.707	80,00 %	22.357.425.988	80,00 %	22.741.858.001
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				17.372.695.550		19.210.650.734		20.010.614.381		20.157.556.336		20.504.161.976

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	58,69 %	10 dokumen	17.372.695.550	10 dokumen	19.210.650.734	10 dokumen	20.010.614.381	10 dokumen	20.157.556.336	10 dokumen	20.504.161.976
4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				1.895.947.360		2.096.530.296		2.183.833.326		2.199.869.652		2.237.696.025
Meningkatnya kualitas kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	6 dokumen	8 dokumen	1.895.947.360	8 dokumen	2.096.530.296	8 dokumen	2.183.833.326	8 dokumen	2.199.869.652	8 dokumen	2.237.696.025
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				2.296.228.698		2.539.159.648		2.644.894.506		2.664.316.496		2.710.128.951
Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	67,50 %	95,60 %	2.296.228.698	95,75 %	2.539.159.648	96,25 %	2.644.894.506	96,25 %	2.664.316.496	96,25 %	2.710.128.951
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD				901.723.098		997.121.457		1.038.643.263		1.046.270.229		1.064.260.662
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	100,00%	1 dokumen	901.723.098	1 dokumen	997.121.457	1 dokumen	1.038.643.263	1 dokumen	1.046.270.229	1 dokumen	1.064.260.662
4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1.394.505.600		1.542.038.192		1.606.251.243		1.618.046.268		1.645.868.289
Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 orang	20 orang	1.394.505.600	20 orang	1.542.038.192	20 orang	1.606.251.243	20 orang	1.618.046.268	20 orang	1.645.868.289
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				24.000.000.000		26.539.095.001		27.644.227.332		27.847.224.437		28.326.052.570

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	52,18 %	92,00 %	24.000.000.000	93,00 %	26.539.095.001	93,50 %	27.644.227.332	93,50 %	27.847.224.437	93,50 %	28.326.052.570
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				24.000.000.000		26.539.095.001		27.644.227.332		27.847.224.437		28.326.052.570
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	12 dokumen	24.000.000.000	12 dokumen	26.539.095.001	12 dokumen	27.644.227.332	12 dokumen	27.847.224.437	12 dokumen	28.326.052.570
Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan		95,3	7.154.199.747	95,75	7.911.082.781	96,25	8.240.513.508	96,5	8.301.025.251	96,75	8.443.759.922
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.080.130.640		4.511.790.611		4.699.669.123		4.734.179.736		4.815.583.125
Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	67,50 %	95,60 %	4.080.130.640	95,75 %	4.511.790.611	96,25 %	4.699.669.123	96,25 %	4.734.179.736	96,25 %	4.815.583.125
4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3.080.130.640		3.405.994.986		3.547.826.318		3.573.878.718		3.635.330.935
Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 laporan	12 laporan	3.080.130.640	12 laporan	3.405.994.986	12 laporan	3.547.826.318	12 laporan	3.573.878.718	12 laporan	3.635.330.935

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1.000.000.000		1.105.795.625		1.151.842.805		1.160.301.018		1.180.252.190
Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 laporan	12 laporan	1.000.000.000	12 laporan	1.105.795.625	12 laporan	1.151.842.805	12 laporan	1.160.301.018	12 laporan	1.180.252.190
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				3.074.069.107		3.399.292.170		3.540.844.384		3.566.845.515		3.628.176.797
Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	52,18 %	92,00 %	3.074.069.107	93,00 %	3.399.292.170	93,50 %	3.540.844.384	93,50 %	3.566.845.515	93,50 %	3.628.176.797
4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				3.074.069.107		3.399.292.170		3.540.844.384		3.566.845.515		3.628.176.797
Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	12 dokumen	3.074.069.107	12 dokumen	3.399.292.170	12 dokumen	3.540.844.384	12 dokumen	3.566.845.515	12 dokumen	3.628.176.797
Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti		81	8.802.264.100	82,25	9.733.505.132	83,25	10.138.824.576	84	10.213.275.998	85	10.388.891.485
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				8.802.264.100		9.733.505.132		10.138.824.576		10.213.275.998		10.388.891.485
Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan	90,62 %	85,50 %	8.802.264.100	86,00 %	9.733.505.132	86,50 %	10.138.824.576	86,50 %	10.213.275.998	86,50 %	10.388.891.485
4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD				145.857.600		161.288.696		168.005.027		169.238.722		172.148.752

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok DPRD yang disusun	-	1 dokumen	145.857.600	1 dokumen	161.288.696	1 dokumen	168.005.027	1 dokumen	169.238.722	1 dokumen	172.148.752
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses				8.656.406.500		9.572.216.436		9.970.819.548		10.044.037.276		10.216.742.733
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 dokumen	150 dokumen	8.656.406.500	150 dokumen	9.572.216.436	150 dokumen	9.970.819.548	150 dokumen	10.044.037.276	150 dokumen	10.216.742.733
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**74.698.575.411**		**82.730.192.356**		**86.395.802.623**		**87.069.123.142**		**88.657.346.806**
Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		95	57.989.087.169	95,50	64.561.427.506	95,50	67.422.015.942	95,50	67.947.465.389	95,50	69.186.891.819
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				81.105.620		90.297.931		94.298.853		95.033.765		96.767.272
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	88,58 %	100,00%	81.105.620	100,00%	90.297.931	100,00%	94.298.853	100,00%	95.033.765	100,00%	96.767.272
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.496.000		9.458.916		9.878.021		9.955.005		10.136.594

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	8.496.000	3 dokumen	9.458.916	3 dokumen	9.878.021	3 dokumen	9.955.005	3 dokumen	10.136.594
4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.852.600		6.515.919		6.804.627		6.857.658		6.982.748
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.852.600	1 dokumen	6.515.919	1 dokumen	6.804.627	1 dokumen	6.857.658	1 dokumen	6.982.748
4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.852.600		6.515.919		6.804.627		6.857.658		6.982.748
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.852.600	1 dokumen	6.515.919	1 dokumen	6.804.627	1 dokumen	6.857.658	1 dokumen	6.982.748
4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.806.200		10.917.611		11.401.348		11.490.204		11.699.796
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	9.806.200	1 dokumen	10.917.611	1 dokumen	11.401.348	1 dokumen	11.490.204	1 dokumen	11.699.796

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD											
4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.852.600		6.515.919		6.804.627		6.857.658		6.982.748
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.852.600	1 dokumen	6.515.919	1 dokumen	6.804.627	1 dokumen	6.857.658	1 dokumen	6.982.748
4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620		50.373.647		52.605.603		53.015.582		53.982.637
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1 dokumen	45.245.620	1 dokumen	50.373.647	1 dokumen	52.605.603	1 dokumen	53.015.582	1 dokumen	53.982.637
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.271.000		22.568.465		23.568.429		23.752.108		24.185.369
Tersedianya pelaporan kinerja Sekertariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang	88,58 %	100,00%	20.271.000	100,00%	22.568.465	100,00%	23.568.429	100,00%	23.752.108	100,00%	24.185.369

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	sesuai peraturan perundangan											
4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				20.271.000		22.568.465		23.568.429		23.752.108		24.185.369
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	20.271.000	6 laporan	22.568.465	6 laporan	23.568.429	6 laporan	23.752.108	6 laporan	24.185.369
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.717.034.549		9.705.001.778		10.135.011.103		10.213.997.706		10.400.310.744
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	97,31 %	100,00%	8.717.034.549	100,00%	9.705.001.778	100,00%	10.135.011.103	100,00%	10.213.997.706	100,00%	10.400.310.744
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.370.575.618		9.319.276.045		9.732.194.630		9.808.041.907		9.986.949.925
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	50 orang	8.370.575.618	50 orang	9.319.276.045	50 orang	9.732.194.630	50 orang	9.808.041.907	50 orang	9.986.949.925
4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				338.310.431		376.653.702		393.342.478		396.407.970		403.638.828
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	338.310.431	12 dokumen	376.653.702	12 dokumen	393.342.478	12 dokumen	396.407.970	12 dokumen	403.638.828

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.285.500		2.544.533		2.657.276		2.677.985		2.726.834
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	2.285.500	1 laporan	2.544.533	1 laporan	2.657.276	1 laporan	2.677.985	1 laporan	2.726.834
4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.577.500		3.982.965		4.159.442		4.191.859		4.268.322
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	3.577.500	1 laporan	3.982.965	1 laporan	4.159.442	1 laporan	4.191.859	1 laporan	4.268.322
4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.285.500		2.544.533		2.657.276		2.677.985		2.726.834

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	2.285.500	1 laporan	2.544.533	1 laporan	2.657.276	1 laporan	2.677.985	1 laporan	2.726.834
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				49.170.676.000		54.743.559.331		57.169.137.556		57.614.681.810		58.665.628.434
Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	92,27 %	95,50 %	49.170.676.000	95,50 %	54.743.559.331	95,50 %	57.169.137.556	95,50 %	57.614.681.810	95,50 %	58.665.628.434
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				49.170.676.000		54.743.559.331		57.169.137.556		57.614.681.810		58.665.628.434
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	49.170.676.000	50 orang	54.743.559.331	50 orang	57.169.137.556	50 orang	57.614.681.810	50 orang	58.665.628.434
Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD		95,50	16.709.488.242	95,50	18.168.764.850	95,50	18.973.786.682	95,50	19.121.657.753	95,50	19.470.454.987
4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70.000.000		77.933.628		81.386.712		82.020.994		83.517.135

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Kegiatan Administrasi BMD yang Berjalan Baik	74,88 %	100,00%	70.000.000	100,00%	77.933.628	100,00%	81.386.712	100,00%	82.020.994	100,00%	83.517.135
4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000		77.933.628		81.386.712		82.020.994		83.517.135
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	77.933.628	1 dokumen	81.386.712	1 dokumen	82.020.994	1 dokumen	83.517.135
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				540.752.000		602.039.500		628.714.673		633.614.523		645.172.255
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	72,97 %	100,00%	540.752.000	100,00%	602.039.500	100,00%	628.714.673	100,00%	633.614.523	100,00%	645.172.255
4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.752.000		8.630.593		9.012.997		9.083.239		9.248.926
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	7.752.000	12 dokumen	8.630.593	6 laporan	9.012.997	6 laporan	9.083.239	6 laporan	9.248.926

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				533.000.000		593.408.907		619.701.676		624.531.284		635.923.329
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	533.000.000	50 orang	593.408.907	50 orang	619.701.676	50 orang	624.531.284	50 orang	635.923.329
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.988.463.654		6.667.181.377		6.962.590.923		7.016.853.459		7.144.847.543
Terpenuhinya penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Sarana prasarana yang Berjalan Baik	88,61 %	100,00%	1.884.992.904	100,00%	2.098.633.358	100,00%	2.191.619.628	100,00%	2.208.699.884	100,00%	2.248.988.672
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				750.000.000		835.003.153		872.000.482		878.796.365		894.826.447
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	750.000.000	12 paket	835.003.153	12 paket	872.000.482	12 paket	878.796.365	12 paket	894.826.447
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				294.292.781		327.647.200		342.164.596		344.831.235		351.121.285
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	294.292.781	12 paket	327.647.200	12 paket	342.164.596	12 paket	344.831.235	12 paket	351.121.285

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				840.700.123		935.983.005		977.454.550		985.072.283		1.003.040.939
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 laporan	1 laporan	840.700.123	1 laporan	935.983.005	1 laporan	977.454.550	1 laporan	985.072.283	1 laporan	1.003.040.939
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik	88,61 %	100%	1.303.470.750	100%	1.451.202.915	100%	1.515.502.830	100%	1.527.313.810	100%	1.555.173.467
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				156.470.750		174.204.759		181.923.426		183.341.235		186.685.554
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	156.470.750	1 dokumen	174.204.759	1 dokumen	181.923.426	1 dokumen	183.341.235	1 dokumen	186.685.554
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.147.000.000		1.276.998.155		1.333.579.404		1.343.972.575		1.368.487.914

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	1.147.000.000	12 laporan	1.276.998.155	12 laporan	1.333.579.404	12 laporan	1.343.972.575	12 laporan	1.368.487.914
Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik	88,61 %	100%	2.800.000.000	100%	3.117.345.105	100%	3.255.468.466	100%	3.280.839.764	100%	3.340.685.404
4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.800.000.000		3.117.345.105		3.255.468.466		3.280.839.764		3.340.685.404
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	2.800.000.000	12 laporan	3.117.345.105	12 laporan	3.255.468.466	12 laporan	3.280.839.764	12 laporan	3.340.685.404
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.597.348.615		4.005.063.248		4.182.519.634		4.215.115.851		4.292.003.575
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pengadaan BMD Sekretariat DPRD	90,13 %	100,00%	3.597.348.615	100,00%	4.005.063.248	100,00%	4.182.519.634	100,00%	4.215.115.851	100,00%	4.292.003.575
4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		700.000.000		731.015.608		2.493.554.833		750.151.075
Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	-	0 unit	-	1 unit	700.000.000	1 unit	731.015.608	4 unit	2.493.554.833	2 unit	750.151.075

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.756.839.662		2.369.293.080		2.474.271.744		736.712.734		2.539.039.646
Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	3 unit	2.756.839.662	3 unit	2.369.293.080	3 unit	2.474.271.744	3 unit	736.712.734	3 unit	2.539.039.646
4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				840.508.953		935.770.168		977.232.283		984.848.284		1.002.812.854
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 unit	55 unit	840.508.953	55 unit	935.770.168	55 unit	977.232.283	55 unit	984.848.284	55 unit	1.002.812.854
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.676.251.576		4.092.908.877		4.274.257.528		4.307.568.698		4.386.142.850
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	96,99 %	100,00%	3.676.251.576	100,00%	4.092.908.877	100,00%	4.274.257.528	100,00%	4.307.568.698	100,00%	4.386.142.850
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.135.936		110.371.759		115.262.112		116.160.400		118.279.277

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	99.135.936	12 laporan	110.371.759	12 laporan	115.262.112	12 laporan	116.160.400	12 laporan	118.279.277
4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				405.000.000		450.901.703		470.880.260		474.550.037		483.206.282
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	405.000.000	12 laporan	450.901.703	12 laporan	470.880.260	12 laporan	474.550.037	12 laporan	483.206.282
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.172.115.640		3.531.635.415		3.688.115.156		3.716.858.260		3.784.657.292
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	3.172.115.640	12 laporan	3.531.635.415	12 laporan	3.688.115.156	12 laporan	3.716.858.260	12 laporan	3.784.657.292
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.577.872.397		1.322.168.928		1.380.751.603		1.391.512.408		1.416.894.919
Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	76,51 %	92,50 %	1.187.572.397	92,50 %	1.322.168.928	92,50 %	1.380.751.603	92,50 %	1.391.512.408	92,50 %	1.416.894.919

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				344.025.597		383.016.611		399.987.315		403.104.592		410.457.604
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	9 unit	344.025.597	9 unit	383.016.611	9 unit	399.987.315	9 unit	403.104.592	9 unit	410.457.604
4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				643.546.800		716.484.810		748.230.826		754.062.118		767.816.929
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	39 unit	643.546.800	39 unit	716.484.810	39 unit	748.230.826	39 unit	754.062.118	39 unit	767.816.929
4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		222.667.507		232.533.462		234.345.697		238.620.386

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	100 unit	200.000.000	100 unit	222.667.507	100 unit	232.533.462	100 unit	234.345.697	100 unit	238.620.386
Terpeliharanya Sarana Prasana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	76,25 %	92,50 %	390.300.000	92,50 %	434.535.641	92,50 %	453.789.051	92,50 %	457.325.629	92,50 %	465.667.683
4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		222.667.507		232.533.462		234.345.697		238.620.386
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 unit	248 unit	200.000.000	248 unit	222.667.507	248 unit	232.533.462	248 unit	234.345.697	248 unit	238.620.386
4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				190.300.000		211.868.133		221.255.589		222.979.931		227.047.297
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	190.300.000	1 unit	211.868.133	1 unit	221.255.589	1 unit	222.979.931	1 unit	227.047.297
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				1.257.000.000		1.399.465.285		1.461.472.808		1.472.862.709		1.499.729.126

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	92,27 %	95,50 %	1.257.000.000	95,50 %	1.399.465.285	95,50 %	1.461.472.808	95,50 %	1.472.862.709	95,50 %	1.499.729.126
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.107.000.000		1.232.464.654		1.287.072.711		1.297.103.435		1.320.763.836
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	6 paket	1.107.000.000	6 paket	1.232.464.654	6 paket	1.287.072.711	6 paket	1.297.103.435	6 paket	1.320.763.836
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				150.000.000		167.000.631		174.400.096		175.759.273		178.965.289
Terlaksananya medical checkup DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check up DPRD	50 orang	50 orang	150.000.000	50 orang	167.000.631	50 orang	174.400.096	50 orang	175.759.273	50 orang	178.965.289
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				1.800.000		2.004.008		2.092.801		2.109.111		2.147.583
Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD	Prosentase ketertiban pelayanan administrasi DPRD	75,86 %	100,00%	1.800.000	100,00%	2.004.008	100,00%	2.092.801	100,00%	2.109.111	100,00%	2.147.583
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				1.800.000		2.004.008		2.092.801		2.109.111		2.147.583
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket	1 paket	1.800.000	1 paket	2.004.008	1 paket	2.092.801	1 paket	2.109.111	1 paket	2.147.583

Sumber : Sekretariat DPRD 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. *Output* entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indikator Tujuan : Prosentase Raperda Menjadi Perda	Persen	88,50	88,90	89,30	89,50	89,75	89,80	
2	Indikator Sasaran 1 : Persentase Raperda yang disetujui DPRD	Persen	80	82	83	84	85	86	
3	Indikator Sasaran 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD	Angka	79,50	80,35	81,55	82,15	83,45	84,77	
4	Indikator Sasaran 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Angka	94,50	95,60	95,75	96,25	96,5	96,75	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran operasional atau taktis untuk memantau capaian kegiatan dan output yang mendukung pencapaian IKU.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Sekretariat DPRD ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD

Permasalahan meningkatnya kapasitas kinerja DPRD sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

Sebagai penutup, Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat DPRD beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kapasitas Anggota DPRD, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang.

30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
P E N D A H U L U A N

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, maka sebagai salah satu Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagai suatu organisasi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi *stakeholder* bidang perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang adalah:
1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang, khususnya bidang perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) serta Penetapan Kinerja;
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci; dengan disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, tugas pokok dari Bappeda Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Kota Semarang mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat; Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan UPTB;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
c. Pengoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat; Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
d. Penyelenggaran manajemen kinerja pegawai Badan;
e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat; Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
f. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat; Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan UPTB;
h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat; Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan UPTB;
i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

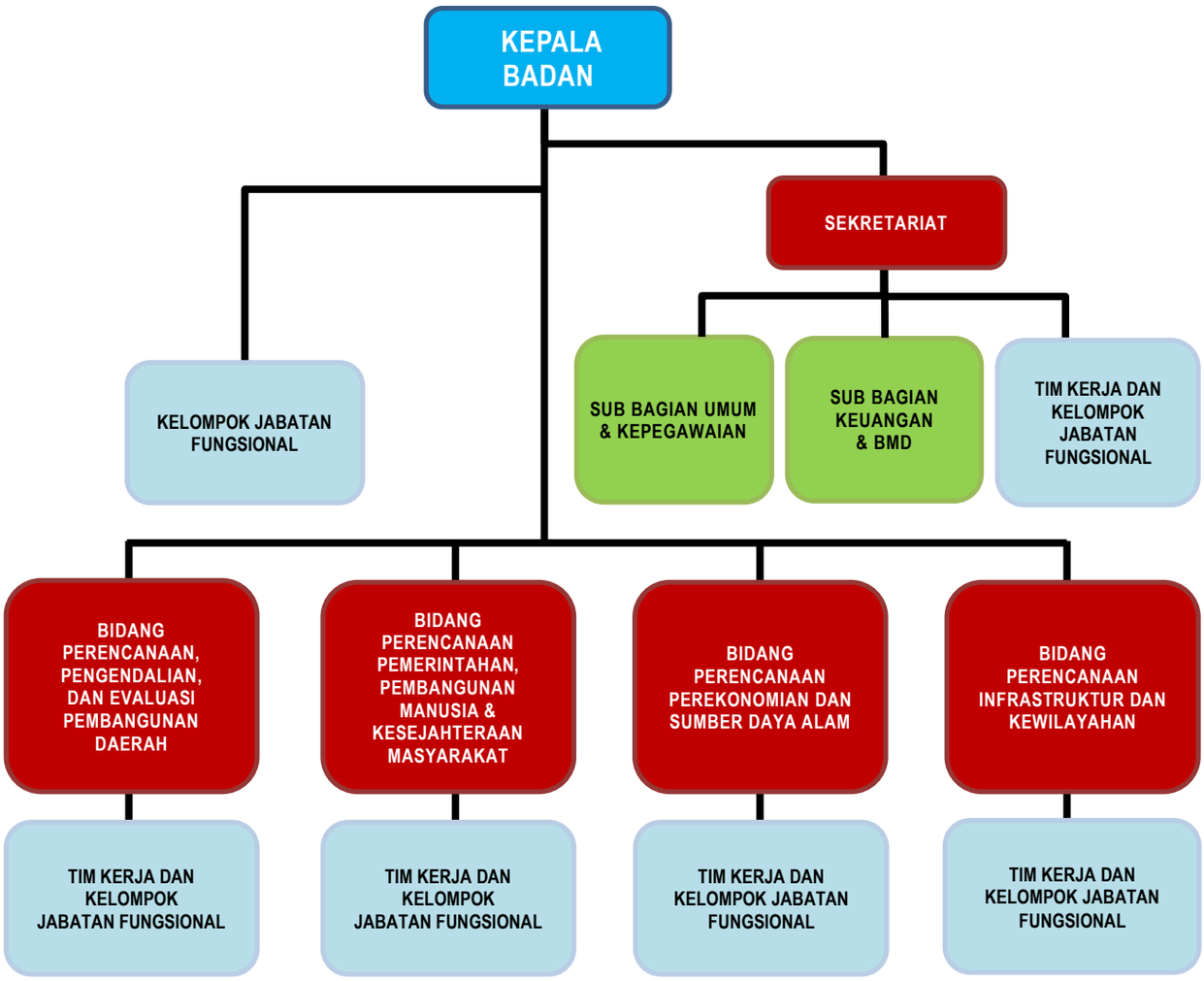

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bappeda Kota Semarang

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Bappeda Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat; Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian; dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan UPTB.

Sekretariat terdiri atas:

1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Dalam rangka membantu fungsi sekretariat terkait perencanaan dan evaluasi pada sekretariat dapat dibentuk 1 (satu) tim kerja.

3. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat

Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Tim Kerja dengan memperhatikan susunan organisasi sebelum adanya penyederhanaan birokrasi, yaitu terkait perumusan kebijakan:

1) Perencanaan Pemerintahan;
2) Perencanaan Pembangunan Manusia;
3) Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat.

4. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Tim Kerja dengan memperhatikan susunan organisasi sebelum adanya penyederhanaan birokrasi, yaitu terkait perumusan kebijakan:

1) Perencanaan Ekonomi Makro;
2) Perencanaan Ekonomi Dunia Usaha;
3) Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam.

5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Tim Kerja dengan memperhatikan susunan organisasi sebelum adanya penyederhanaan birokrasi, yaitu terkait perumusan kebijakan:

1) Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan;
2) Perencanaan Infrastruktur Dasar;
3) Perencanaan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Tim Kerja dengan memperhatikan susunan organisasi sebelum adanya penyederhanaan birokrasi, yaitu terkait perumusan kebijakan:

1) Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;
2) Pelaksanaan Pengelolaan serta Analisis Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah;
3) Pelaksanaan Koordinasi atas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Jabatan Fungsional

Pada Bappeda Kota Semarang juga terdapat Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda Kota Semarang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia pada Bappeda Kota Semarang di klasifikasikan ke berdasar tingkat pendidikan, golongan, dan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Bappeda Kota Semarang per Agustus 2025

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	-	-	-	-
3	D3	4	1	-	-	5
4	S1	18	27	1	2	48
5	S2	6	5	-	-	11
6	S3	1	-	-	-	1

Sumber: Bappeda Kota Semarang per Agusutus 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 65 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Bappeda Kota Semarang per Agustus 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	-	3
2	Golongan III	18	30	48
3	Golongan IV	2	1	3

Sumber: Bappeda Kota Semarang per Agusutus 2025

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Bappeda Kota Semarang per Agustus 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	-	2	2
4	Jabatan Fungsional	12	14	26
5	Jabatan Pelaksana	9	12	21

Sumber: Bappeda Kota Semarang per Agusutus 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Bappeda Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Aset Tanah Bappeda Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
	NIHIL										

Sumber: Bappeda Kota Semarang per Agusutus 2025

Tabel 2.5.
Gedung dan Bangunan Bappeda Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Kincir Angin)	Rusak Berat (RB)	300	Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang	300	Tanah Milik Pemda	Pembelian	Rp. 490.611.250,-

Sumber: Bappeda Kota Semarang per Agusutus 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang berdasarkan bidang urusan yaitu capaian kinerja urusan Perencanaan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Indikator Tujuan**																		
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Indeks	-	-	N/A	N/A	91	91,20	90,40	N/A	N/A	91,74	91,86	90,42	N/A	N/A	100,81	100,72	100,02
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21,15	22,50	22,59	23,01	23,17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	**Indikator Sasaran**																		
	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	-	-	N/A	N/A	88,80	89,60	100,00	N/A	N/A	89,04	89,82	100,01	N/A	N/A	100,27	100,25	100,01
	Nilai AKIP Bappeda	Nilai	-	-	N/A	N/A	80,60	81,00	81,50	N/A	N/A	80,60	81,40	81,85	N/A	N/A	100,00	100,49	100,43
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (DO Baru)	Indeks	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	**Indikator Program**																		
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	Persen	-	-	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	N/A	99,44%	99,83%	99,66%	N/A	N/A	99,44	99,83	99,66
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	-	-	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	N/A	98,74%	99,17%	100,65%*	N/A	N/A	98,74	99,17	100,65
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	-	-	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	N/A	100,47%	101,40%	100,63%	N/A	N/A	100,47	101,40	100,63
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	-	-	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	N/A	98,30%	100,25%	98,19%	N/A	N/A	98,30	100,25	98,19
	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	Nilai	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43,21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	Nilai	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	46,55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V
	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA	Nilai	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	46,55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	46,55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	**Indikator Kinerja Kunci** (Berdasar Permendagri 86 Tahun 2017)																		
	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	**Indikator Kinerja Kunci** (Berdasar Permendagri 18 Tahun 2020)																		
	Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggara SPAM	Jumlah	-	-	1 BUMD/ UPTD	1 BUMD/ UPTD	1 BUMD/ UPTD	1 BUMD/ UPTD	1 BUMD/ UPTD	1 BUMD/ UPTD	1 BUMD/ UPTD	1 BUMD/ UPTD	1 BUMD/ UPTD	1 BUMD/ UPTD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah	-	-	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah kerjasama penyelenggaran SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain	Jumlah	-	-	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	N/A	2.196.405.580	2.090.490.572	2.631.830.000	4.253.300.000	N/A	1.269.585.291	1.769.365.605	2.115.789.660	3.657.868.254	N/A	57,80	84,64	80,39	86,00	0,28	0,44
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	6.649.030.996	7.971.542.641	8.491.905.000	9.970.800.000	N/A	5.977.106.569	7.190.290.979	7.894.610.457	9.512.734.816	N/A	89,89	90,20	92,97	95,41	0,15	0,17
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	15.631.064.524	12.538.568.968	11.697.976.033	11.382.037.963	N/A	13.408.076.952	11.506.567.761	11.252.272.888	10.737.906.624	N/A	85,78	91,77	96,19	94,34	-0,10	-0,07

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

c. Kerjasama / Mitra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Semarang memiliki mitra kerja dari berbagai kalangan, diantaranya :

1) Lembaga / Kementerian Pusat, diantaranya Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian PUPR, dll;
2) Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Bappeda Provinsi Jawa Tengah, BPKAD Provinsi Jawa Tengah, dll;
3) Lembaga Pembiayaan Nasional, diantaranya PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), dll
4) Lembaga Pembiayaan Internasional, diantaranya World Bank, ADB (Asian Development Bank), KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), dll
5) Lembaga ad hoc Pemerintah Kota Semarang, diantaranya LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), DP2K (Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota), Komite Ekonomi Kreatif, Tim PEL (Pengembangan Ekonomi Lokal), Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan), dll
6) Lembaga Swadaya Masyarakat, diantaranya Tanoto Foundation, YSS (Yayasan Sosial Soegijapranata), Bintari, Kalandara, Pattiro, WALHI, MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), dll

d. Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam kurun waktu tahun 2021-2024 berbagai inovasi telah dikembangkan oleh Bappeda Kota Semarang terkait tugas dan fungsinya, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang terus dikembangkan, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1) Live Streaming Musrenbang Tingkat Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Pemerintah Kota Semarang. Siaran langsung Musrenbang juga dapat disaksikan melalui videotron Pemerintah Kota Semarang.

2) Alokasi Anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Dialokasikan anggaran (dedicated) untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, sebagai bentuk realisasi dari proses partisipatif hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

3) Kampung Tematik

Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil

kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

4) **Pangripta**
Inovasi Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.

5) **Jurnal Riptek Online**
Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

6) **Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat – Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)**
Merupakan sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi data spasial di sektor pelayanan PDAM, non PDAM, pengolahan limbah, dan persampahan, dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.

7) **Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)**
Merupakan sistem informasi yang dapat membantu seluruh kelurahan di kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan seluruh kelurahan di Kota Semarang.

8) **Newrenbang**
Suatu konsep baru untuk proses perencanaan partisipatif yang dikenal dengan istilah Musrenbang. Newrenbang menghadirkan mekanisme perencanaan yang adaptif dan tidak dibatasi ruang maupun jumlah peserta. Dengan integrasi data, teknologi informasi, dan pendekatan spasial akan menghasilkan kualitas input yang lebih baik, sehingga kualitas output dari proses perencanaan partisipatif juga lebih baik. Newrenbang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem perencanaan partisipatif yang sudah canggih, melainkan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penyusunan proposal dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti (*evidence-based planning*).

e. Penghargaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam kurun waktu tahun 2021-2024 berbagai penghargaan telah diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang terkait tugas dan fungsinya, baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. **Penghargaan Pembangunan Daerah atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota** dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini, yaitu meraih gelar **Kota Terbaik I** pada tahun 2021 (sebelumnya juga meraih gelar Kota Terbaik I pada tahun 2019 dan 2020), serta meraih gelar **Kota Terbaik III** pada tahun 2023.

2. **Penghargaan Kota Terinovatif pada Gelaran Innovative Government Award (IGA)** dari Kementerian Dalam Negeri.
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini pada tahun 2022 dan 2023.

3. **Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities**.
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini, yaitu meraih gelar **Pemenang Terbaik I** pada tahun 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, serta **Lima Besar Kota Terbaik** pada tahun 2024 dari APEKSI dan PT. Surveyor Indonesia.

4. **Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM** dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini pada Tahun 2022 dengan total nilai 100, dimana Bappeda merupakan anggota Sekretariat Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2021-2025.

5. **Anugerah Parahita Ekapraya** terkait Pengarustamaan Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini, yaitu meraih **Kategori Utama** pada tahun 2021, serta **Kategori Mentor (Tertinggi)** pada tahun 2023. Dalam hal ini Kepala Bappeda berperan sebagai Ketua Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) Kota Semarang.

6. **Penghargaan Kota Layak Anak** dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini, yaitu meraih **Kategori Nindya** pada tahun 2021 dan 2022, serta meraih **Kategori Utama** pada tahun 2023. Dalam hal ini Kepala Bappeda berperan sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Semarang.

7. **Penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wistara** dari Kementerian Kesehatan.
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini pada tahun 2021.

8. **Penetapan Kota dan Kabupaten Kreatif Subsektor Fesyen** dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini pada tahun 2021.

9. **Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik 1 Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award** dari BKKBN.
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini pada tahun 2024.

10. **Penghargaan UI Green Metric Ranking** dari Universitas Indonesia.
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini, yaitu sebagai **Kota Terbaik dan Berkelanjutan Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang** pada tahun 2023, dan sebagai **Kota Paling Berkelanjutan Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur** pada tahun 2024.

11. **Penghargaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah** dari Gubernur Jawa Tengah.
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini, yaitu meraih gelar **Kota Terbaik I** pada tahun 2021, **Kota Terbaik II** pada tahun 2022, dan menjadi **Kota Terbaik I** pada tahun 2023.

12. **Penghargaan Pemetaan Daya Saing Daerah (IDSD)** dari Gubernur Jawa Tengah.
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini, yaitu meraih gelar **Juara I Kategori Ekosistem Inovasi** pada tahun 2021, **Juara Umum Kota** pada tahun 2022, serta **Kategori Sangat Tinggi** pada tahun 2023.

13. **Terbaik I Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting** dari Provinsi Jawa Tengah.
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini pada tahun 2024.

14. **Juara 1 Lomba Hari Habitat** dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini pada tahun 2022.

15. **Peringkat 2 Kategori Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah dalam rangka Gerakan Hemat Energi dan Air** pada Earth Day.
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut menghantarkan Kota Semarang meraih penghargaan ini pada tahun 2024.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dalam 5 tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain :

a. **Tantangan**

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
   Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.
   Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu

diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

3) Perencanaan dan penganggaran dengan "*e-performance based budgeting*".
   Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "*e-performance based budgeting*" sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

4) Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.
   Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. **Peluang**

Sedangkan peluang bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
   Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
   Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
   Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
   Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Bappeda Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, telahaan dokumen lain yang terkait, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan identifikasi permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, perlu mencermati permasalahan yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Bappeda. Dimana disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kota Semarang adalah “penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu ditingkatkan”. Dalam permasalahan utama tersebut, masalah yang perlu menjadi perhatian terkait tugas dan fungsi Bappeda yaitu “penyelenggaraan manajemen pemerintahan perlu ditingkatkan”, dimana salah satu akar masalahnya adalah “belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan”.

Untuk selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang berdasarkan hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, serta dengan mempertimbangkan permasalahan pada tingkat Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam

RPJMD Kota Semarang. Maka dapat dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yaitu: **"Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang"**. Hal ini terlihat dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja tahun 2024 sebesar 23,17, dimana nilai ini masih belum mencapai target akhir periode RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebesar 24,00 (dalam meraih Nilai AKIP Total 80,00 / Predikat A).

Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang ini berkaitan erat dengan "belum optimalnya sinergitas, kualitas, dan keterhubungan perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang" (komponen pembentuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)), dimana hal ini terlihat dari IPPD Kota Semarang tahun 2024 sebesar 89,76. Nilai ini masih jauh dari Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) sebesar 98,82 maupun IPPN Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,90.

Dari permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang tersebut, kemudian dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Rumusan Permasalahan
"Belum optimalnya sinergitas, kualitas, dan keterhubungan perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.1 Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
		1.2. Belum optimalnya koordinasi analisis data dan informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah
		1.3. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi sebagai feedback dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
2	Belum optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan	2.1. Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		2.2. Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		2.3. Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
3	Belum optimalnya kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.1. Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.3. Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1) Permasalahan "Belum optimalnya sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah", dimana akar permasalahannya adalah :
   1.1) Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
   1.2) Belum optimalnya koordinasi analisis data dan informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah
   1.3) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi sebagai feedback dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
2) Permasalahan "Belum optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan" dimana akar permasalahannya adalah :
   2.1) Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   2.2) Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   2.3) Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3) Permasalahan "Belum optimalnya kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah", dimana akar permasalahannya adalah :
   3.1) Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   3.2) Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   3.3) Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.2. Telaahan Dokumen Lain

a. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Telaahan ini dimaksudkan untuk menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang sesuai dengan lingkup Bappeda Kota Semarang. Adapun isu global ataupun nasional yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2025-2029 diantaranya adalah "Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah (diantaranya pemberantasan korupsi dan tata kelola data)".

Terkait hal ini, akuntabilitas Kota Semarang yang diwujudkan dalam Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) belum mencapai angka yang optimal. Dimana bila dibandingkan dengan target sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk tahun 2024 dari target tahun 2024 sebesar 76, realisasinya adalah sebesar 73,12 (capaian sebesar 96,21%). Terlebih bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 80,00, maka capaiannya hanya sebesar 91,40%.

b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, Dan Inklusif"

Dalam mencapai visi tersebut, terdapat pokok visi yang akan diwujudkan Kota Semarang di tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1) **Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif**
2) **Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif**

3) **Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif**
4) **Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.**

Kemudian dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Semarang untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan 7 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran dan Berbudaya dalam Semangat Kebhinekaan, serta Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian.**

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi sekolah swasta gratis, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial rumah inspirasi, dan pendampingan kelompok disabilitas seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat yang Berfokus pada Kebutuhan Individu dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu danmeningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3 **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak**

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi aman dan layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, bussiness matching dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk

meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), peremajaan armada BRT secara merata dan proporsional di seluruh koridor, perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, serta Dampaknya Bagi Masyarakat

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif bagi wilayah yang berhasil mengelola ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan

pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Terkait hal ini, secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengoordinasikan pencapaian seluruh misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pencapaian Misi 7, yaitu "**Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas**".

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu **"Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat"** (Tujuan 7 RPJMD), dengan indikator tujuan "**Indeks Reformasi Birokrasi**" (Indikator Tujuan 8 RPJMD). Lalu pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, yaitu "Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil"; "Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat"; serta "Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang"; dimana secara khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pencapaian sasaran **"Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil"** (Sasaran ke-17 RPJMD). Adapun pada sasaran tersebut terdapat 3 indikator sasaran, yaitu "Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)", "Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)", serta "Indeks Integritas Nasional", dimana secara khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pencapaian indikator sasaran "**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**" (Indikator Sasaran 19 RPJMD).

Selanjutnya, dalam perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan yang didukung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara khusus tersebut telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "**Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah**" (Strategi 7 RPJMD), yang memiliki 5 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan; Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan sistem merit; serta Pengembangan kota cerdas untuk

pengelolaan kota berbasis data; dimana secara khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pelaksanaan arah kebijakan "Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan" (Arah Kebijakan 35 RPJMD).

Secara lengkap peranan Bappeda dalam mendukung pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang beserta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersaji pada gambar berikut.

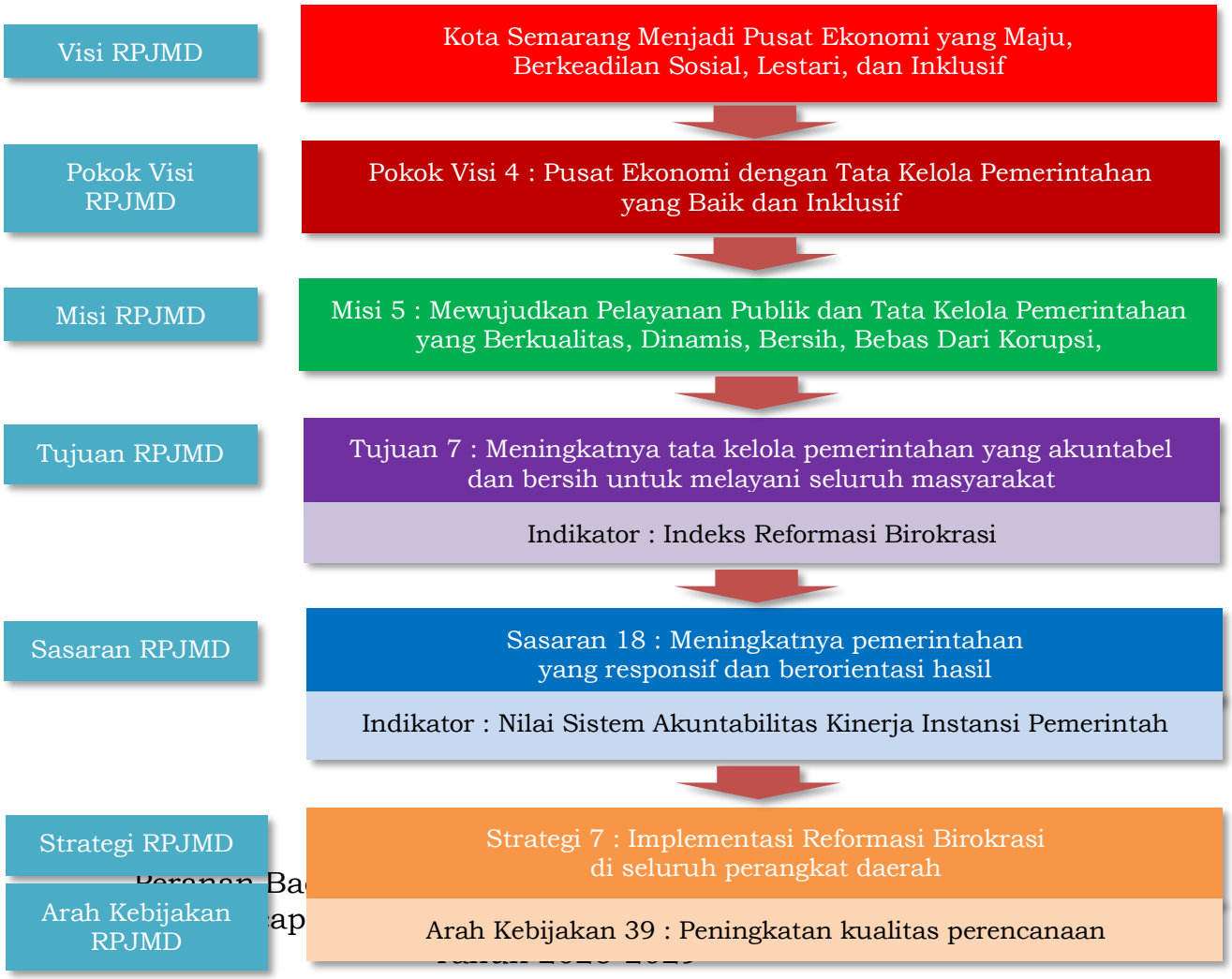

Kemudian dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, maka diperlukan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program-program prioritas yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang disampaikan saat proses pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi prioritas bagi Perangkat Daerah.

Program-program prioritas tersebut lalu disusun berdasarkan keterkaitannya dengan Pokok Visi, Tujuan, Sasaran, Outcome Program,

Indikator Tujuan dan Sasaran, Program Prioritas sesuai Nomenklatur, serta Program Prioritas sesuai Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota. Beberapa program prioritas tersebut ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.8
Program Prioritas RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029
Yang Terkait Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat			Angka pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis		
		Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis		Tingkat pengembangan kawasan strategis		
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan masterplan kawasan strategis
Pusat ekonomi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, humanis dan inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyakarat			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
			Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Persentase laporan kinerja yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
			daerah			
			Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan kota	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

c. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029
(masih menggunakan Renstra Tahun 2020-2024)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas merupakan kementerian / lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN / Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Renstra Kementerian PPN / Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN / Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun Visi Kementrian PPN / Bappenas adalah :

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan dan Sasaran Kementrian PPN / Bappenas sebagai berikut :

Misi 1 Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mampercepat kemajuan Indonesia, dengan sasaran :

Sasaran 1 Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

Sasaran 2 Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

Tujuan 2 **Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan**, dengan sasaran :

Sasaran 3 Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

Misi 2 Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 3 **Mewujdukan tata Kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien,** dengan sasaran :

Sasaran 4 Terwujudnya kinerja Kementerian PPN / Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Secara lebih lengkapnya tujuan, sasaran beserta indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas Tahun 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Akhir
Tujuan 1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat	95 %
				c Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	
			2	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	95 %
	2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	3	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	96-100 %
Tujuan 2 Mewujudkan daya	3	Terwujudnya kebijakan	4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis	97-100 %

Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Akhir
tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif & berkelanjutan		pembangunan nasional yang visioner		Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	
			5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	95-100 %
Tujuan 3 Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN / Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	6	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	91
			7	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	95
			8	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	95 %

Sumber : Renstra Kementerian PPN / Bappenas Tahun 2025-2029

d. Telaahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun untuk mencapai visi dan misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis, dengan sasaran :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran :

Sasaran 1 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Kinerja

Secara lebih lengkapnya tujuan, sasaran beserta indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Akhir
Tujuan 1 **Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis**				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	84,00
	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	95,20
	1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	2	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	3,30
Tujuan 2 **Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah**				Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	95,20
	2.1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN	28,60
	2.2	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN	56,60
	2.3	Meningkatnya Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Kinerja	3	Skor Aspek Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja	10,00

Sumber : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

e. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bappeda. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Bappeda dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Bappeda dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Bappeda dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Semarang adalah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kota Semarang, Bappeda berkewajiban untuk mengawal perencanaan pada RTRW agar dapat terwadahi dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan tata ruang wilayah memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui :

a) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, meliputi :

1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional, meliputi :
   a) Menerapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
   b) Mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
   c) Mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
   d) Mengembangkan kegiatan Pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
   e) Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
   f) Mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
2. Peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan, meliputi :
   a) meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
   b) mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) jalan lingkar tengah (*middle ring road*), jalan lingkar luar (*outer ring road*), dan jalan radial;
   c) meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
   d) mengembangkan sistem transportasi massal;
   e) mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
   f) mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhanlaut; dan meningkatkan integrasi sistem antar moda.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum, meliputi:
   a) mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;

b) mengembangkan sistem prasarana energi;
c) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi padakawasan pertumbuhan ekonomi;
d) mengembangkan prasarana sumber daya air;
e) meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknikyang berwawasan lingkungan;
f) meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
g) meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
h) mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

b) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang, meliputi :

1. Kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan lindung, meliputi :
   a) Peningkatan pengelolaan Kawasan yang berfungsi lindung, meliputi :
      1) mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
      2) meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
      3) menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.
   b) Pelestarian Kawasan cagar budaya, meliputi :
      1) meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
      2) mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
   c) Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota, meliputi :
      1) mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
      2) mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
      3) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
      4) mengembangkan kegiatan *agroforestry* di kawasan pertanian lahankering yang dimiliki masyarakat;
      5) mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
      6) mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalampenyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan budidaya, meliputi :
   a) pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan dayadukung dan daya tampung, meliputi :
      1) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;

2) mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
3) membatasi pengembangan kawasan industri.

b) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien, meliputi :
1) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal dikawasan pusat kota; dan
2) mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisiendengan sistem insentif dan disinsentif

c) pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai, meliputi :
1) mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat;
2) mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untukmenanggulangi potensi banjir dan rob; dan
3) melakukan penghijauan kawasan pantai

c) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi :

1. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi :
   a) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan
   b) mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.
2. pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
   a) mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
   b) mengatur pemanfaatan Kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
   c) meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial Kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
3. pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
   a) memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
   b) mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian;dan
   c) pengembangan kegiatan kepariwisataan.

d) Rencana Struktur Ruang, meliputi :

1. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan, meliputi :
   a) rencana pembagian wilayah kota (BWK)
      Rencana pembagian wilayah kota (BWK) meliputi:
      1) BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan;
      2) BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan

Gajahmungkur;
3) BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara;
4) BWK IV meliputi Kecamatan Genuk;
5) BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan ;
6) BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang;
7) BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik;
8) BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati;
9) BWK IX meliputi Kecamatan Mijen; dan
10) BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.

Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing BWK meliputi:
1) perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, BWK II, BWK III;
2) pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II;
3) transportasi udara dan transportasi laut di BWK III;
4) industri di BWK IV dan BWK X;
5) pendidikan di BWK VI dan BWK VIII;
6) perkantoran militer di BWK VII; dan
7) kantor pelayanan publik di BWK IX.

b) rencana penetapan pusat pelayanan.

2. rencana pengembangan sistem jaringan, meliputi :
a) rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
b) rencana pengembangan sistem jaringan energi;
c) rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
d) rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
e) rencana pengembangan pengembangan sistem infrastruktur perkotaan; dan
f) rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan lainnya

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kota Semarang telah menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Diantaranya adalah terkait upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terkait hal tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, yaitu Rekomendasi untuk Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Unggul, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Rekomendasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Terkait Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

INDIKATOR	Satuan	Target (PERPRE 111/2022)	BASELINE 2022	TARGET DENGAN UPAYA TAMBAHAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran 1. Terwujudnya kapasitas pembiayaan pembangunan yang inovatif								
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	%	Naik	NA	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata
Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	12	1,28	5,30	6,64	7,98	9,32	10,66

Berdasarkan tabel di atas, rincian rekomendasi terkait tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah :

1) Peningkatan proporsi anggaran riset
- Peningkatan anggaran riset untuk pembangunan ekonomi yang selaras dengan perkembangan IPTEK;
- Perkuatan badan riset daerah dengan dukungan tenaga yang profesional yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah;
- Peningkatan kerja sama antara pihak swasta (universitas) dengan pemerintah daerah;
- Peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan riset.

2) Peningkatan penerimaan pendapatan
- Penyusunan rencana strategis daerah peningkatan PAD;
- Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk mendorong peningkatan PAD;
- Optimalisasi peranan BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;

3) Kebijakan keuangan yang akuntabel
- Pengembangan kebijakan keuangan daerah untuk memastikan adanya distribusi yang adil bagi masyarakat.

f. Telaahan Kebijakan Lainnya

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, juga perlu memerhatikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan di Kota Semarang. Diantaranya adalah kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perwujudan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak.

Dalam hal Pengarusutamaan Gender, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran diantaranya sebagai berikut :

- Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), diantaranya akan mengadakan Bimbingan Teknis PPRG setiap tahunnya.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada masing-masing perangkat daerah, dengan mengarahkan perangkat daerah agar menyusun Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang pada setiap tahunnya.

Adapun dalam Perwujudan Kota Layak Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran diantaranya sebagai berikut :

- Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kota Layak Anak, serta menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak setiap tahunnya.

2.2.3. Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.12
Isu Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bappeda	Permasalahan Bappeda	Isu KLHS Relevan dengan Bappeda	Permasalahan dan Isu Strategis			Isu Strategis Bappeda
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang	-	-	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	- Perencanaan Pembangunan daerah belum berkualitas - Kinerja OPD belum mendukung pencapaian kinerja daerah	- Koordinasi Pencapaian Visi & Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang - Pelaksanaan Program Prioritas dari Visi & Misi Kepala Daerah - Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah - Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah - Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), maka visi dan misi setiap perangkat daerah di lingkungan Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Rencana Strategis periode tahun 2025-2029, visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misi RPJMD, dimana kemudian diterjemahkan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah, untuk membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang perencanaan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang secara khusus memberikan dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Pemerintahan yang Responsif dan Berorientasi Hasil” dengan indikator sasaran RPJMD “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”. SAKIP sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Intenal. Dari keempat komponen tersebut, Bappeda memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian komponen “Perencanaan Kinerja”. Dengan demikian ditetapkan **Tujuan Bappeda** untuk periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan Bappeda, ditetapkan indikator tujuan dari Bappeda Kota Semarang, yaitu **"Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja"**. Indikator ini merupakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk komponen "Perencanaan Kinerja".

Nilai komponen "Perencanaan Kinerja" ini menggambarkan hasil penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras, yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Komponen ini sendiri terdiri dari beberapa sub komponen, yaitu : (1) ketersediaan dokumen perencanaan; (2) dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain; serta (3) perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa sasaran yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang Sinergis, Berkualitas, dan Selaras**

   Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang, perlu diwujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, berkualitas, dan selaras, dengan penjelasan sebagai berikut :

   - Sinergis disini berarti mendukung perencanaan serta kebijakan nasional dan provinsi;
   - Berkualitas berarti adanya kesesuaian antara hasil evaluasi – permasalahan - isu strategis - prioritas - target - program / kegiatan / proyek di RPJMD atau RKPD; adanya inovasi perencanaan pembangunan; serta adanya keselarasan RKPD terhadap RPJMD dan APBD terhadap RKPD;
   - Selaras berarti terdapat keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah; adanya keselarasan Renja terhadap RKPD dan Renstra; terimplementasinya kegiatan dedicated RKPD ke dalam RKA perangkat daerah; serta ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran RPJMD.

   Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, maka ditetapkan indikator sasaran yaitu **"Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kota Semarang"**. Indikator ini selaras dengan arahan pada

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025; serta mengadopsi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang merupakan salah satu NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) terkait perencanaan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, namun mengalami beberapa penyesuaian sesuai kondisi di Kota Semarang.
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kota Semarang tersebut terdiri dari 3 komponen sebagai berikut :

1) Sinergi Perencanaan
   Komponen ini terdiri dari : (a) keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi Jateng; (b) keselarasan dokumen RKPD dengan RKP dan RKPD Provinsi Jateng; serta (c) kesesuaian anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program prioritas nasional / major project dalam dokumen RKPD.
2) Kualitas Perencanaan
   Komponen ini terdiri dari : (a) kesesuaian antara isu strategis - target - program / kegiatan / proyek di RPJMD atau RKPD; (b) inovasi perencanaan pembangunan; (c) persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD; serta (d) persentase keselarasan APBD terhadap RKPD.
3) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja
   Komponen ini terdiri dari : (a) cascading target pembangunan daerah menjadi target kinerja lembaga terkait di dalam pemerintah daerah; (b) keselarasan Renja terhadap RKPD; (c) keselarasan Renja terhadap Renstra; (d) implementasi kegiatan dedicated RKPD ke dalam RKA; serta (e) rerata persentase capaian target indikator tujuan & sasaran RPJMD.

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan indikator sasaran yaitu :

a. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah"

Indikator ini merupakan hasil penilaian dari Inspektorat Kota Semarang terhadap AKIP (Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Internal Bappeda.

b. “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah”

Indikator ini merupakan hasil penilaian dari penerima layanan yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, yang dilakukan melalui aplikasi ASIK MAS.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA BASE	TARGET						KETERANGAN
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)												- Peraturan MenPAN RB No. 88 Tahun 2021 - SE MenPPN / Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2023
Sasaran RPJMD: Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja**	Angka	23,17	23,33	23,75	23,91	24,07	24,23	24,93	Nilai AKIP dari KemenPAN RB, Komponen Perencanaan Kinerja
		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang Sinergis, Berkualitas, dan Selaras	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kota Semarang	Angka	89,76	89,97	91,29	92,07	94,83	96,60	97,39	Mengadopsi pengukuran IPPN dengan beberapa penyesuaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA BASE	TARGET						KETERANGAN
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	81,85	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	83,00	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda dari Inspektorat Kota Semarang
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	91,22	91,50	91,75	92,00	92,25	92,50	92,75	Hasil penilaian melalui aplikasi ASIK MAS

Sumber :
- *Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional*
- *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- *RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029*
- *Laporan Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Kota Semarang*
- *Bappeda Kota Semarang, 2025*

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis, dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah, baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*), yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Adapun strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi Bappeda Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Mengoptimalkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam mewujudkan sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah				
Pelaksanaan dan pemantapan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029			*Evaluasi hasil perencanaan tahun 2025-2029 serta penyusunan kebijakan awal untuk perencanaan jangka menengah tahap berikutnya*	*Penyusunan perencanaan jangka menengah tahap berikutnya*
Mengoptimalkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
Pelaksanaan dan pemantapan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 beserta pendampingan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			*Penyusunan kebijakan awal untuk perencanaan jangka menengah tahap berikutnya*	*Penyusunan perencanaan jangka menengah tahap berikutnya beserta pendampingan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*
Mengoptimalkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam				
beserta pendampingan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			*Penyusunan kebijakan awal untuk perencanaan jangka menengah tahap berikutnya*	*Penyusunan perencanaan jangka menengah tahap berikutnya beserta pendampingan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam*

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Mengoptimalkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
Pelaksanaan dan pemantapan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 beserta pendampingan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			*Penyusunan kebijakan awal untuk perencanaan jangka menengah tahap berikutnya*	*Penyusunan perencanaan jangka menengah tahap berikutnya beserta pendampingan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*
Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah				
Peningkatan mutu / kualitas layanan internal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah				*Supporting penyusunan perencanaan jangka menengah tahap berikutnya*

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	Meningkatnya pemerintahan yangresponsif dan berorientasi hasil	Pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel dengan memperketat sistem perencanaan, penganggaran, serta audit keuangan yang transparan	1. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam mewujudkan sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.1. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	
				1.2. Meningkatkan koordinasi analisis data dan informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah	
				1.3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi sebagai feedback dalam penyusunan rencana pembangunan daerah	

No.	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
			2. Mengoptimalkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.1. Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				2.2. Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				2.3. Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam men-capai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
			3. Mengoptimalkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3.1. Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Makro	
				3.2. Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam men-capai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Dunia Usaha	
				3.3. Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam men-capai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	
			4. Mengoptimalkan Koordinasi, Sinergi-tas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pemba-ngunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4.1. Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam men-capai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan	
				4.2. Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam men-capai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Dasar	
				4.3. Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan	

No.	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
				Keselarasan Perencanaan dalam men-capai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	
			5. Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah	5.1. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				5.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				5.3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
NSPK : - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional **Sasaran RPJMD yang Relevan** : Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang**				**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja**		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang Sinergis, Berkualitas, dan Selaras			**Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kota Semarang**		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas		**Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bangda
				Tersedianya perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang berkualitas	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan Bangda
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan Bangda
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan Bangda
				Terlaksananya Musren-bang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan Bangda
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan Bangda
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan Bangda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terpenuhinya analisis data dan informasi untuk Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua Tim Kerja Pengelolaan serta Analisis Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Bangda
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Staf Tim Kerja Pengelolaan serta Analisis Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Bangda
				Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Staf Tim Kerja Pengelolaan serta Analisis Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Bangda
				Perencanaan pembangunan daerah yang terkendali dan terevaluasi dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua Tim Kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Bangda
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Staf Tim Kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Bangda
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Staf Tim Kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Bangda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		**Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat
				Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Pemerintahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ketua Tim Kerja Perencanaan Pemerintahan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Staf Tim Kerja Perencanaan Pemerintahan
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Staf Tim Kerja Perencanaan Pemerintahan
				Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ketua Tim Kerja Perencanaan Pembangunan Manusia
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Staf Tim Kerja Perencanaan Pembangunan Manusia

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ketua Tim Kerja Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Staf Tim Kerja Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekono-mian dan Sumber Daya Alam		**Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangu-nan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Makro	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Makro	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Ketua Tim Kerja Perencanaan Ekonomi Makro
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Staf Tim Kerja Perencanaan Ekonomi Makro
				Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Dunia Usaha	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Dunia Usaha	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Ketua Tim Kerja Perencanaan Ekonomi Dunia Usaha
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Staf Tim Kerja Perencanaan Ekonomi Dunia Usaha

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Ketua Tim Kerja Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Staf Tim Kerja Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pemba-ngunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Staf Tim Kerja Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		**Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Infra-struktur Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua Tim Kerja Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Staf Tim Kerja Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan
				Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Infrastruktur Dasar	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dasar	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua Tim Kerja Perencanaan Infrastruktur Dasar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Staf Tim Kerja Perencanaan Infrastruktur Dasar
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Staf Tim Kerja Perencanaan Infrastruktur Dasar
				Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua Tim Kerja Perencanaan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Staf Tim Kerja Perencanaan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			**(1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		**(1) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Sekretaris
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta pelaporan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				kinerja yang sesuai peraturan perundangan			
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penye-lenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi
				Terwujudnya tertib adminis-trasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Sub Bagian Keuangan dan BMD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keua-ngan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keua-ngan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keua-ngan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu-sunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwu-lanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwu-lanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keua-ngan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Sub Bagian Keuangan dan BMD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Sub Bagian Keuangan dan BMD
					(2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		**(2) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepega-waian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		Sekretaris
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisn Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKP	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Selanjutnya terkait program prioritas, Bappeda Kota Semarang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah, dimana bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Bappeda Kota Semarang
Dalam Mendukung Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome Program	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Kete rangan
1	Penyusunan masterplan kawasan strategis	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
2	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			- Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			- Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang tersaji pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kota Semarang

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN				31.939.955.416		35.417.065.243		36.930.465.275		37.208.455.357		37.864.176.386	
05.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah				4.544.958.993		5.025.795.781		5.235.078.319		5.273.520.549		5.364.197.803	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	43,21	44,60	4.544.958.993	45,30	5.025.795.781	45,99	5.235.078.319	46,69	5.273.520.549	47,4	5.364.197.803	
5.01.02.2.01 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				2.795.400.000		3.121.080.000		3.294.820.000		3.316.020.000		3.499.160.000	
Tersedianya perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	2.795.400.000	100%	3.121.080.000	100%	3.294.820.000	100%	3.316.020.000	100%	3.499.160.000	
5.01.02.2.01.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik				232.950.000		251.700.000		292.030.000		297.230.000		324.400.000	
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	1 Berita Acara	232.950.000	1 Berita Acara	251.700.000	1 Berita Acara	292.030.000	1 Berita Acara	297.230.000	2 Berita Acara	324.400.000	
	Jumlah BA Konsultasi Publik RKPD		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		
	Jumlah BA Konsultasi Publik RPJMD										1 Berita Acara		
5.01.02.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah				155.300.000		184.580.000		199.080.000		200.210.000		229.600.000	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	155.300.000	1 Berita Acara	184.580.000	1 Berita Acara	199.080.000	1 Berita Acara	200.210.000	2 Berita Acara	229.600.000	
	Jumlah BA Forum OPD RKPD		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		
	Jumlah BA Forum OPD RPJMD										1 Berita Acara		
5.01.02.2.01.0005 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				543.550.000		587.300.000		613.830.000		615.290.000		646.200.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	543.550.000	1 Berita Acara	587.300.000	1 Berita Acara	613.830.000	1 Berita Acara	615.290.000	2 Berita Acara	646.200.000	
	Jumlah BA Musrenbang RKPD		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		
	Jumlah BA Musrenbang RPJMD										1 Berita Acara		
5.01.02.2.01.0007 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				1.863.600.000		2.097.500.000		2.189.880.000		2.203.290.000		2.298.960.000	
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	6 Dokumen	2 Dokumen	1.863.600.000	2 Dokumen	2.097.500.000	2 Dokumen	2.189.880.000	2 Dokumen	2.203.290.000	3 Dokumen	2.298.960.000	
	Jumlah Dokumen RKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen RPJMD										1 Dokumen		
5.01.02.2.02 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				543.550.000		587.300.000		602.125.000		606.375.000		529.200.000	
Terpenuhinya analisis data dan informasi untuk Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	100%	100%	543.550.000	100%	587.300.000	100%	602.125.000	100%	606.375.000	100%	529.200.000	
5.01.02.2.02.0001 Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				543.550.000		587.300.000		602.125.000		606.375.000		529.200.000	
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	543.550.000	2 Dokumen	587.300.000	2 Dokumen	602.125.000	2 Dokumen	606.375.000	2 Dokumen	529.200.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun									Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)												
	Jumlah Dokumen Analisis Kebijakan Perencanaan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
5.01.02.2.03 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				1.206.008.993		1.317.415.781		1.338.133.319		1.351.125.549		1.335.837.803	
Perencanaan pembangunan daerah yang terkendali dan terevaluasi dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	100%	100%	1.206.008.993	100%	1.317.415.781	100%	1.338.133.319	100%	1.351.125.549	100%	1.335.837.803	
5.01.02.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				776.500.000		839.000.000		844.500.000		823.500.000		833.600.000	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	776.500.000	2 Laporan	839.000.000	2 Laporan	844.500.000	2 Laporan	823.500.000	3 Laporan	833.600.000	
	Jumlah Laporan Pengendalian Semester 1		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Pengendalian Semester 2		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Penyusunan Perwal Renstra OPD										1 Laporan		
5.01.02.2.03.0003 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				429.508.993		478.415.781		493.633.319		527.625.549		502.237.803	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	4 Laporan	429.508.993	4 Laporan	478.415.781	4 Laporan	493.633.319	5 Laporan	527.625.549	4 Laporan	502.237.803	
	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Triwulan 1		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun									Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Triwulan 2		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Triwulan 3		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Triwulan 4		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD								1 Laporan				
05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				14.400.643.636		15.924.168.730		16.587.277.767		16.709.081.474		16.996.391.195	
(1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	46,55	46,69	4.520.000.000	46,77	5.300.000.000	48,84	5.530.000.000	49,91	5.260.000.000	49,99	6.450.000.000	
5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				4.520.000.000		5.300.000.000		5.530.000.000		5.260.000.000		6.450.000.000	
(1) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Pemerintahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	100%	100%	1.800.000.000	100%	2.280.000.000	100%	2.330.000.000	100%	2.260.000.000	100%	2.500.000.000	
5.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				950.000.000		1.400.000.000		1.430.000.000		1.510.000.000		1.700.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	950.000.000	3 Dokumen	1.400.000.000	3 Dokumen	1.430.000.000	3 Dokumen	1.510.000.000	3 Dokumen	1.700.000.000	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Rencana Umum TMMD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan		1 Dokumen										

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Indeks Reformasi Birokrasi dalam Kualitas Tata Kelola Pemerintahan												
	Jumlah Dokumen Strategi Implementasi Indeks Harmoni Indonesia di Kota Semarang				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Kepuasan Publik Terhadap Layanan Kota Semarang						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen RAD Bela Negara Tahun 2030-2034 Kota Semarang								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Strategi Implementasi Sistem Merit dalam Tata Kelola ASN										1 Dokumen		
5.01.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				850.000.000		880.000.000		900.000.000		750.000.000		800.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	3 Laporan	850.000.000	3 Laporan	880.000.000	3 Laporan	900.000.000	2 Laporan	750.000.000	2 Laporan	800.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Hasil Pengukuran IP2WK		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu 6 SPM di Kota Semarang		1 Laporan										
	Jumlah Laporan Evaluasi RAD HAM				1 Laporan								
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi						1 Laporan						

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Bantuan Operasional RT dan RW di Kota Semarang												
(2) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	100%	100%	1.750.000.000	100%	1.720.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.350.000.000	100%	2.400.000.000	
5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.750.000.000		1.720.000.000		1.450.000.000		1.350.000.000		2.400.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	1.750.000.000	6 Dokumen	1.720.000.000	4 Dokumen	1.450.000.000	3 Dokumen	1.350.000.000	7 Dokumen	2.400.000.000	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Kegiatan TOT/Bintek PPRG		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen RAD Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Strategi Pencapaian IPP		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen NA dan Ranperda Pencegahan dan Penurunan Stunting		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Kota Semarang Tahun 2026-2030		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV / AIDS Kota Semarang Tahun 2026-2030		1 Dokumen										

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Sehat Kota Semarang Tahun 2026-2030		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Pembangunan Digitalisasi Arsip Pemerintahan				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Semarang Kota Inklusif Tahun 2027-2030				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Semarang Kota Ramah Lanjut Usia 2027-2030				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Ketenagakerjaan Kota Semarang 2027-2030				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Peran Komunitas atau Organisasi Kepemudaan dalam Proses Pembangunan di Kota Semarang						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Optima-lisasi Bonus Demografi dalam Pembangunan Kota Semarang						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Optimalisasi Layanan Keluarga Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Indeks Pembangunan Keluarga								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Tahun 2030-2034										1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Pendidikan Kota Semarang Tahun 2030-2034										1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Kesehatan Kota Semarang Tahun 2030-2034										1 Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial Kota Semarang Tahun 2030-2034										1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2030-2034										1 Dokumen		
(3) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	970.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.550.000.000	
5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				970.000.000		1.300.000.000		1.750.000.000		1.650.000.000		1.550.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	6 Laporan	970.000.000	6 Laporan	1.300.000.000	8 Laporan	1.750.000.000	7 Laporan	1.650.000.000	6 Laporan	1.550.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Monev Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB/SDGs Kota Semarang		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Monev KLA		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Support System untuk Kompetisi		1 Laporan										

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Olahraga, Seni dan Inovator Muda												
	Jumlah Laporan Evaluasi Plaksanaan Kelas Khusus Olahraga Kota Semarang				1 Laporan								
	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Kota Semarang						1 Laporan						
	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Semarang						1 Laporan						
	Jumlah Laporan Evaluasi Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kota Semarang						1 Laporan						
	Jumlah Laporan Evaluasi Cakupan Pelayanan Satuar Pendidikan di Kota Semarang								1 Laporan				
	Jumlah Laporan Evaluasi Cakupan Pelayanan Puskesmas di Kota Semarang								1 Laporan				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan SDGs/TPB Kota Se-marang Tahun 2018-2030										1 Laporan		
(2) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	46,55	46,69	4.124.643.636	46,77	4.574.168.730	48,84	4.767.277.767	49,91	4.849.081.474	49,99	4.446.391.195	
5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				4.124.643.636		4.574.168.730		4.767.277.767		4.849.081.474		4.446.391.195	
(1) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Makro	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Makro	100%	100%	1.150.000.000	100%	1.130.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.230.000.000	100%	950.000.000	
5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1.150.000.000		1.130.000.000		1.200.000.000		1.230.000.000		950.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	4 Dokumen	1.150.000.000	4 Dokumen	1.130.000.000	4 Dokumen	1.200.000.000	4 Dokumen	1.230.000.000	2 Dokumen	950.000.000	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Roadmap Pengembangan Ekonomi Syariah Kota Semarang		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekosistem UMKM Kota Semarang 2026–2030		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Roadmap Kota Semarang sebagai Kota Kreatif dan Destinasi Budaya 2026–2030		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Strategi Penguatan Kapasitas Ekspor di Kota Semarang				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Transformasi Digital UMKM dan Koperasi Kota Semarang				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Ekowisata dan Wisata Tematik sebagai Daya Ungkit Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Tabel Input Output Kota Semarang						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Kajian Strategis Peningkatan Daya Saing Ekonomi						1 Dokumen						

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kreatif Kota Semarang Berbasis Klaster Inovasi Lokal												
	Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah Kota dalam Mendorong Investasi Sektor Ekonomi Lokal						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Roadmap Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dalam Perencanaan Ekonomi Makro								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Strategi Pemulihan dan Adaptasi Ekonomi Lokal Pascabencana dan Krisis melalui Pendekatan Ketangguhan Komunitas								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Investasi Kota Semarang melalui Perencanaan Ekonomi Makro Terintegrasi										1 Dokumen		
(2) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Dunia Usaha	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Dunia Usaha	100%	100%	860.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.450.000.000	
5.01.03.2.02.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangu-nan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				860.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.450.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	3 Laporan	860.000.000	3 Laporan	1.200.000.000	3 Laporan	1.250.000.000	3 Laporan	1.250.000.000	3 Laporan	1.450.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun									Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Kajian Indeks Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Lokal Kota Semarang		1 Laporan										
	Jumlah Laporan Outlook Perkembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif Kota Semarang				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
(3) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	100%	100%	2.114.643.636	100%	2.244.168.730	100%	2.317.277.767	100%	2.369.081.474	100%	2.046.391.195	
5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.810.000.000		1.790.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.500.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	1.810.000.000	4 Dokumen	1.790.000.000	4 Dokumen	1.850.000.000	5 Dokumen	1.900.000.000	3 Dokumen	1.500.000.000	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Outlook Sistem Pangan Berkelanjutan Kota Semarang		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Bisnis Plan Urban Farming Kota Semarang		1 Dokumen										

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Dokumen Rencana Integrasi Distribusi Komoditas Bahan Pokok Kota Semarang		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Peta Aset Pangan Kota Semarang		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Peta Jalan Susut Sisa Pangan Kota Semarang				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Outlook Energi Kota Semarang				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Ekonomi Hijau Kota Semarang						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Potensi Ekonomi Sektor Perikanan Kota Semarang						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Masterplan Perikanan								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Masterplan Pertanian								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Studi dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Kota Semarang								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi Tahun 2030-2034										1 Dokumen		
5.01.03.2.02.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				304.643.636		454.168.730		467.277.767		469.081.474		546.391.195	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	2 Laporan	304.643.636	2 Laporan	454.168.730	2 Laporan	467.277.767	2 Laporan	469.081.474	2 Laporan	546.391.195	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemba-		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	ngunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam												
	Jumlah Laporan Monev RAD Pangan dan Gizi		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
(3) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	46,55	46,69	5.756.000.000	46,77	6.050.000.000	48,84	6.290.000.000	49,91	6.600.000.000	49,99	6.100.000.000	
5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				5.756.000.000		6.050.000.000		6.290.000.000		6.600.000.000		6.100.000.000	
(1) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	100%	100%	2.400.000.000	100%	2.320.000.000	100%	2.750.000.000	100%	2.900.000.000	100%	2.350.000.000	
5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2.400.000.000		2.320.000.000		2.750.000.000		2.900.000.000		2.350.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	5 Dokumen	2.400.000.000	4 Dokumen	2.320.000.000	5 Dokumen	2.750.000.000	6 Dokumen	2.900.000.000	3 Dokumen	2.350.000.000	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Identifikasi Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pengendalian Banjir Sungai Baru, Sungai Asin, Sungai Semarang dan Sungai Silandak		1 Dokumen										

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Dokumen Review Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Kajian Manajemen Traffic pada Kawasan Strategis				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Kajian Manajemen Keselamatan Jalan				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Strategis				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Review Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD)						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengenyediaan Air Minum						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Review Urban Mobility Plan Kota Semarang						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Kajian Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen RP2P Kota Semarang								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Roadmap Pengelolaan Sumber Daya Air								1 Dokumen				

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Dokumen Roadmap Pengembangan Transportasi Berkelanjutan								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi										1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Drainase Sistem Semarang Timur										1 Dokumen		
(2) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Infrastruktur Dasar	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dasar	100%	100%	1.556.000.000	100%	1.630.000.000	100%	1.840.000.000	100%	1.830.000.000	100%	2.350.000.000	
5.01.03.2.03.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				760.000.000		730.000.000		850.000.000		780.000.000		1.250.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	760.000.000	3 Laporan	730.000.000	5 Laporan	850.000.000	3 Laporan	780.000.000	4 Laporan	1.250.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Baseline Kawasan Kumuh Kota Semarang		1 Laporan										
	Jumlah Keputusan Walikota tentang Kawasan Kumuh Kota Semarang		1 Laporan										
	Jumlah Laporan Evaluasi Penanganan Banjir dan Rob						1 Laporan						

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Layanan Perkotaan						1 Laporan						
	Jumlah Laporan Environmental Health Risk Assesment										1 Laporan		
5.01.03.2.03.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangu-nan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				796.000.000		900.000.000		990.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	796.000.000	2 Laporan	900.000.000	2 Laporan	990.000.000	2 Laporan	1.050.000.000	2 Laporan	1.100.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
(3) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	100%	100%	1.800.000.000	100%	2.100.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.870.000.000	100%	1.400.000.000	
5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.800.000.000		2.100.000.000		1.700.000.000		1.870.000.000		1.400.000.000	
Terlaksananya Koordi-nasi Penyusunan Doku-men Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangu-nan Daerah Bidang Kewi-layahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	5 Dokumen	1.800.000.000	5 Dokumen	2.100.000.000	4 Dokumen	1.700.000.000	5 Dokumen	1.870.000.000	3 Dokumen	1.400.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun									Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Semarang Lama		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Masterplan Sport Centre Kota Semarang		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumen Kajian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Semarang		1 Dokumen										
	Jumlah Dokumn Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim				1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel				1 Dokumen								
	Jumlah Masterplan Peningkatan Sarana Gedung Pemerintahan												
	Jumlah Dokumen Perencanaan dampak Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Kota Semarang						1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Implementasi Bangunan Gedung Hijau Kota Semarang								1 Dokumen				
	Jumlah Dokumen RAD Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kota Semarang								1 Dokumen				
5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12.994.352.787		14.467.100.732		15.108.109.189		15.225.853.334		15.503.587.388	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	100,00 %	100,00 %	10.510.979.309	100,00 %	11.138.169.087	100,00 %	11.711.928.060	100,00 %	12.275.029.706	100,00 %	12.865.667.111	
5.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,				65.250.000		70.825.000		73.955.000		75.045.000		75.833.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	65.250.000	100%	70.825.000	100%	73.955.000	100%	75.045.000	100%	75.833.000	
5.01.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.250.000		2.925.000		3.395.000		3.605.000		3.700.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	2.250.000	3 Dokumen	2.925.000	3 Dokumen	3.395.000	3 Dokumen	3.605.000	5 Dokumen	3.700.000	
	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja Bappeda		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		
	Jumlah Dokumen RTP ROO Bappeda		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Renstra Bappeda										1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen RTP RSO Bappeda										1 Dokumen		
5.01.01.2.01.0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.750.000		4.875.000		5.335.000		5.565.000		5.570.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000	1 Dokumen	4.875.000	1 Dokumen	5.335.000	1 Dokumen	5.565.000	1 Dokumen	5.570.000	
5.01.01.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.750.000		4.875.000		5.335.000		5.565.000		5.570.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000	1 Dokumen	4.875.000	1 Dokumen	5.335.000	1 Dokumen	5.565.000	1 Dokumen	5.570.000	
5.01.01.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.250.000		2.925.000		3.395.000		3.505.000		3.590.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun									Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	2.925.000	1 Dokumen	3.395.000	1 Dokumen	3.505.000	1 Dokumen	3.590.000	
5.01.01.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.250.000		2.925.000		3.395.000		3.605.000		3.650.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	2.925.000	1 Dokumen	3.395.000	1 Dokumen	3.605.000	1 Dokumen	3.650.000	
5.01.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000		3.550.000		3.600.000		3.700.000		3.753.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4 Laporan	3.500.000	4 Laporan	3.550.000	4 Laporan	3.600.000	4 Laporan	3.700.000	4 Laporan	3.753.000	
	Jumlah LKJIP Bappeda		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah LKPJ Bappeda		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah LPPD Bappeda		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Jumlah Laporan PUG Bappeda		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
5.01.01.2.01.0008 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				47.500.000		48.750.000		49.500.000		49.500.000		50.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1 Dokumen	47.500.000	1 Dokumen	48.750.000	1 Dokumen	49.500.000	1 Dokumen	49.500.000	1 Dokumen	50.000.000	
5.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.445.729.309		11.067.344.087		11.637.973.060		12.199.984.706		12.789.834.111	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	10.445.729.309	100%	11.067.344.087	100%	11.637.973.060	100%	12.199.984.706	100%	12.789.834.111	
5.01.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan				10.185.618.059		10.694.898.962		11.229.643.910		11.791.126.106		12.380.682.411	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Gaji dan Tunjangan ASN													
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	10.185.618.059	60 Orang/ Bulan	10.694.898.962	60 Orang/ Bulan	11.229.643.910	60 Orang/ Bulan	11.791.126.106	60 Orang/ Bulan	12.380.682.411	
5.01.01.2.02.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				258.750.000		370.500.000		406.200.000		406.650.000		406.850.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	258.750.000	12 Dokumen	370.500.000	12 Dokumen	406.200.000	12 Dokumen	406.650.000	12 Dokumen	406.850.000	
5.01.01.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				412.500		589.875		645.050		670.050		695.700	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	412.500	1 Laporan	589.875	1 Laporan	645.050	1 Laporan	670.050	1 Laporan	695.700	
5.01.01.2.02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				742.500		1.062.750		1.164.000		1.205.600		1.273.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	742.500	2 Laporan	1.062.750	2 Laporan	1.164.000	2 Laporan	1.205.600	2 Laporan	1.273.000	
5.01.01.2.02.0008 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				206.250		292.500		320.100		332.950		333.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	206.250	1 Dokumen	292.500	1 Dokumen	320.100	1 Dokumen	332.950	1 Dokumen	333.000	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas	(2) Persentase kinerja pelayanan umum dan	96,67 %	96,83 %	2.483.373.478	96,92 %	3.328.931.645	97,00 %	3.396.181.129	97,08 %	2.950.823.628	97,17 %	2.637.920.277	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
5.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				253.250.000		342.225.000		350.615.500		181.454.500		202.010.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90	90,5	253.250.000	90,75	342.225.000	91	350.615.500	91,25	181.454.500	91,5	202.010.000	
5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				750.000		975.000		1.115.500		1.454.500		1.510.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1 Dokumen	750.000	1 Dokumen	975.000	1 Dokumen	1.115.500	1 Dokumen	1.454.500	1 Dokumen	1.510.000	
5.01.01.2.05.0011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				252.500.000		341.250.000		349.500.000		180.000.000		200.500.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	64 Orang	252.500.000	64 Orang	341.250.000	64 Orang	349.500.000	64 Orang	180.000.000	64 Orang	200.500.000	
5.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.259.648.478		1.755.866.645		1.786.990.629		1.537.311.128		1.229.812.277	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	1.259.648.478	100%	1.755.866.645	100%	1.786.990.629	100%	1.537.311.128	100%	1.229.812.277	
5.01.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.250.000		75.562.500		77.600.000		74.475.000		74.900.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	56.250.000	15 Paket	75.562.500	15 Paket	77.600.000	15 Paket	74.475.000	15 Paket	74.900.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.01.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.375.000		24.862.500		26.675.000		27.485.000		28.310.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan-daan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	18.375.000	5 Paket	24.862.500	5 Paket	26.675.000	5 Paket	27.485.000	5 Paket	28.310.000	
5.01.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				52.500.000		70.687.500		72.750.000		73.250.000		75.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	52.500.000	4 Laporan	70.687.500	4 Laporan	72.750.000	4 Laporan	73.250.000	4 Laporan	75.500.000	
5.01.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				702.500.000		908.750.000		925.100.000		876.500.000		721.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	702.500.000	4 Laporan	908.750.000	4 Laporan	925.100.000	4 Laporan	876.500.000	4 Laporan	721.000.000	
5.01.01.2.06.0011 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				430.023.478		676.004.145		684.865.629		485.601.128		330.102.277	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisn Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	430.023.478	1 Dokumen	676.004.145	1 Dokumen	684.865.629	1 Dokumen	485.601.128	1 Dokumen	330.102.277	
5.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				112.500.000		151.125.000		155.200.000		126.950.000		127.800.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	100%	112.500.000	100%	151.125.000	100%	155.200.000	100%	126.950.000	100%	127.800.000	
5.01.01.2.07.0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				112.500.000		151.125.000		155.200.000		126.950.000		127.800.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	6 Unit	112.500.000	6 Unit	151.125.000	6 Unit	155.200.000	6 Unit	126.950.000	6 Unit	127.800.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.225.000		188.565.000		192.545.000		189.988.000		157.438.000	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	141.225.000	100%	188.565.000	100%	192.545.000	100%	189.988.000	100%	157.438.000	
5.01.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.225.000		8.190.000		8.245.000		9.138.000		9.438.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penye-diaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	6.225.000	4 Laporan	8.190.000	4 Laporan	8.245.000	4 Laporan	9.138.000	4 Laporan	9.438.000	
5.01.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				135.000.000		180.375.000		184.300.000		180.850.000		148.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	135.000.000	4 Laporan	180.375.000	4 Laporan	184.300.000	4 Laporan	180.850.000	4 Laporan	148.000.000	
5.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				716.750.000		891.150.000		910.830.000		915.120.000		920.860.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	716.750.000	100%	891.150.000	100%	910.830.000	100%	915.120.000	100%	920.860.000	
5.01.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau				40.500.000		62.400.000		71.780.000		72.720.000		73.560.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome Kegiatan / Output Sub kegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.500.000	1 Unit	62.400.000	1 Unit	71.780.000	1 Unit	72.720.000	1 Unit	73.560.000	
5.01.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				318.750.000		424.125.000		429.650.000		430.650.000		434.100.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	24 Unit	318.750.000	24 Unit	424.125.000	24 Unit	429.650.000	24 Unit	430.650.000	24 Unit	434.100.000	
5.01.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.000.000		160.875.000		164.900.000		166.250.000		167.700.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	6 Unit	120.000.000	6 Unit	160.875.000	6 Unit	164.900.000	6 Unit	166.250.000	6 Unit	167.700.000	
5.01.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				237.500.000		243.750.000		244.500.000		245.500.000		245.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	237.500.000	1 Unit	243.750.000	1 Unit	244.500.000	1 Unit	245.500.000	1 Unit	245.500.000	

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Semarang
yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	23,33	23,75	23,91	24,07	24,23	24,93	
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Angka	89,97	91,29	92,07	94,83	96,60	97,39	

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Selanjutnya terdapat beberapa Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Utama Pembangunan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Utama Pembangunan
yang Menjadi Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Semarang Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH								
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2	2	2	2	2	
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2	2	2	2	2	
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN								
1	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% Bawah)	Persen	17,10	17,54	17,98	18,41	18,85	19,25	

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis ini menjadi penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Perencanaan serta pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang telah teridentifikasi sangatlah kompleks, dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Adapun tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dari dunia usaha di Kota Semarang. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka seluruh potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kemudian dalam pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis ini diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat, dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan secara optimal dan terpadu.

Selanjutnya diharapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

31. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang maka BPKAD Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota. Atas dasar tersebut maka Renstra BPKAD Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang keuangan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan dan regulasi, maka BPKAD Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra BPKAD Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Urusan Keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra BPKAD Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya urusan keuangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BPKAD Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKAD Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan BPKAD Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan BPKAD Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKAD Kota Semarang mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi, dan Bidang Barang Milik Daerah;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi, dan Bidang Barang Milik Daerah, dan UPTB;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan;
5. penyelenggaraan kerja sama Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi, dan Bidang Barang Milik Daerah;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
7. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi, dan Bidang Barang Milik Daerah dan UPTB;
8. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi, dan Bidang Barang Milik Daerah dan UPTB;
9. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

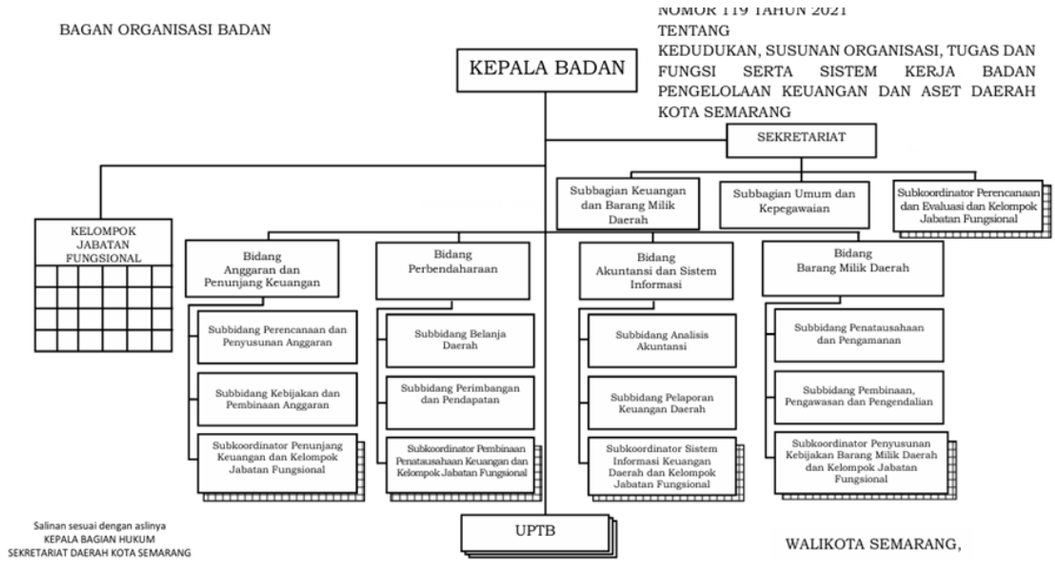

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPKAD Kota Semarang

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural BPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural BPKAD Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2) Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi, dan Bidang Barang Milik Daerah. Sekretariat terdiri dari:

a) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
vi. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
vii. menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Badan;
viii. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;
ix. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
x. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Badan;

xi. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
xii. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
xiii. pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
xiv. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
v. menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan;
vi. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan;
vii. menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan;
viii. menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan;
ix. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Badan;
x. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan;
xi. menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
xii. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan;
xiii. menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan;
xiv. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan;
xv. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
xvi. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
xvii. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
xviii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;

ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
v. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Badan;
vi. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
vii. menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
viii. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
ix. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
x. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
xi. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
xii. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
xiii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Kebijakan dan Pembinaan Anggaran, dan Penunjang Keuangan. Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan terdiri atas:

a) Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
vi. menyiapkan kegiatan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
vii. menyiapkan kegiatan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah);

viii. menyiapkan kegiatan penyusunan dan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
ix. menyiapkan kegiatan penyusunan dan verifikasi perubahan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
x. menyiapkan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
xi. menyiapkan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
xii. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
xiii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
xiv. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan
xv. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Kepala Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
vi. menyiapkan kegiatan penyusunan dan verifikasi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
vii. menyiapkan kegiatan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
viii. menyiapkan kegiatan perencanaan anggaran pendapatan;
ix. menyiapkan kegiatan perencanaan anggaran belanja daerah;
x. menyiapkan kegiatan perencanaan anggaran pembiayaan;
xi. menyiapkan kegiatan pembinaan perencanaan penganggaran daerah;
xii. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran;
xiii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran;
xiv. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran; dan

xv. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Penunjang Keuangan atau Sub Kooirdinator Perencanaan Anggaran

i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penunjang Keuangan;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Penunjang Keuangan;
v. menyiapkan kegiatan analisis investasi pemerintah daerah;
vi. menyiapkan kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah;
vii. menyiapkan kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah;
viii. menyiapkan kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
ix. menyiapkan kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
x. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan kebijakan dan alokasi subsidi;
xi. menyiapkan kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
xii. menyiapkan kegiatan sinkronisasi pendapatan dan belanja daerah;
xiii. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Penunjang Keuangan;
xiv. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Penunjang Keuangan;
xv. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penunjang Keuangan;
xvi. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
xvii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Belanja Daerah, Perimbangan dan Pendapatan, dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan. Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

a) Kepala Subbidang Belanja Daerah

i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbidang Belanja Daerah;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Belanja Daerah;

v. menyiapkan kegiatan penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
vi. menyiapkan kegiatan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
vii. menyiapkan kegiatan penatausahaan pembiayaan daerah;
viii. menyiapkan kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan instansi terkait;
ix. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Belanja Daerah;
x. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Belanja Daerah;
xi. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Belanja Daerah; dan
xii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Kepala Subbidang Perimbangan dan Pendapatan
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbidang Perimbangan dan Pendapatan;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Perimbangan dan Pendapatan;
v. menyiapkan kegiatan pengelolaan kas daerah;
vi. menyiapkan kegiatan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
vii. menyiapkan kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
viii. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
ix. menyiapkan kegiatan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
x. menyiapkan kegiatan pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah;
xi. menyiapkan kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
xii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dana bagi hasil;
xiii. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Perimbangan dan Pendapatan;
xiv. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Perimbangan dan Pendapatan;

xv. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perimbangan dan Pendapatan; dan
xvi. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Pembinaan Penatausahaan Keuangan
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembinaan Penatausahaan Keuangan;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pembinaan Penatausahaan Keuangan;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
vi. menyiapkan kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah;
vii. menyiapkan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data terkait belanja daerah;
viii. menyiapkan kegiatan pengolahan dan analisis data terkait belanja daerah;
ix. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi terkait belanja daerah;
x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terkait belanja daerah;
xi. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan;
xii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pembinaan Penatausahaan Keuangan;
xiii. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan;
xiv. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
xv. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Analisis Akuntansi, Pelaporan Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi terdiri atas:

a) Kepala Subbidang Analisis Akuntansi
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbidang Analisis Akuntansi;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Analisis Akuntansi;

v. menyiapkan kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
vi. menyiapkan kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
vii. menyiapkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
viii. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
ix. menyiapkan kegiatan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
x. menyiapkan kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
xi. menyiapkan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
xii. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Analisis Akuntansi;
xiii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Analisis Akuntansi;
xiv. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Analisis Akuntansi; dan
xv. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah;
v. menyiapkan kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bulanan, triwulanan dan semesteran;
vi. menyiapkan kegiatan konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan laporan keuangan pemerintah daerah;
vii. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
viii. menyiapkan kegiatan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;

ix. menyiapkan kegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
x. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintahan daerah;
xi. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah;
xii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah
xiii. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
xiv. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Sistem Informasi Keuangan Daerah
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem Informasi Keuangan Daerah;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
v. menyiapkan kegiatan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
vi. menyiapkan kegiatan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
vii. menyiapkan kegiatan pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah daerah;
viii. menyiapkan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
ix. menyiapkan kegiatan analisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
x. menyiapkan kegiatan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
xi. menyiapkan kegiatan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan di bawahnya;
xii. menyiapkan kegiatan memberikan rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
xiii. menyiapkan kegiatan menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
xiv. menyiapkan kegiatan menyajikan informasi keuangan daerah;
xv. menyiapkan kegiatan mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);
xvi. menyiapkan kegiatan mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan internasional);

xvii. menyiapkan kegiatan mengidentifikasi informasi keuangan daerah;
xviii. menyiapkan kegiatan memverifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah;
xix. menyiapkan kegiatan menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1-2 metode);
xx. menyiapkan kegiatan menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode);
xxi. menyiapkan kegiatan mengolah data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metode terpilih;
xxii. menyiapkan kegiatan menyajikan rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi keuangan daerah;
xxiii. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
xxiv. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
xxv. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
xxvi. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
xxvii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Penatausahaan dan Pengamanan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dan Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah. Bidang Barang Milik Daerah terdiri atas:

a) Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan;
v. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;
vi. menyiapkan kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
vii. menyiapkan kegiatan pengamanan barang milik daerah;
viii. menyiapkan kegiatan penilaian barang milik daerah;
ix. menyiapkan kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
x. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan;
xi. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan;

xii. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan; dan
xiii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Kepala Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
v. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
vi. menyiapkan kegiatan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
vii. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah;
viii. menyiapkan kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah daerah;
ix. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
x. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
xi. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
xii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah
i. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah;
ii. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
iii. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
iv. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan standar harga;
vi. menyiapkan kegiatan penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
vii. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
viii. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
ix. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah;
x. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah;

xi. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah;
xii. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
xiii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7) Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya BPKAD Kota Semarang

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKAD Kota Semarang perlu didukung oleh personil atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas memiliki integritas dan moral, kompetensi dan pengetahuan, mampu beradaptasi terhadap tuntutan tugas dan tanggung jawab, lingkungan dan teknologi serta kreatif. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BPKAD Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	4	2	1	0	7
3	D3	9	9	0	0	18
4	S1/D4	17	15	7	8	47
5	S2	8	5	0	0	13
6	S3	0	0	0	0	0

Dari jumlah pegawai sebanyak 85 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di BPKAD Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	10	11	21
2	Golongan III	21	18	39
3	Golongan IV	3	6	9
4	PPPK	8	8	16

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di BPKAD Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah BPKAD Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
					NIHIL						

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan BPKAD Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	RB	776	Jalan Ronggolawe Selatan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	188.100.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	4297	Jl. Genuksari - Karangroto Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	14.344.222.550
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	RB	84	Jl Raya Semarang Kendal Mangkang Wetan, Tugu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.000.000
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	RB	84	Jl Bei Wongso, Genuksari, Genuk		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.000.000
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	RB	500	Jl Brotojoyo No 2 Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.000.000
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	RB	84	Jl Purwomukti Raya, Pedurungan Lor		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.000.000
7	Bangunan Gedung Parkir Terbuka Permanen	B	263,4	Jl. Genuksari - Karangroto Semarang		Tanah Milik Pemda	Hibah	62.549.211

2.1.3. Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Semarang

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja BPKAD Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja BPKAD Kota Semarang

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. IPKD menjadi cerminan dari kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Adapun capaian IPKD Kota Semarang dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut ini:

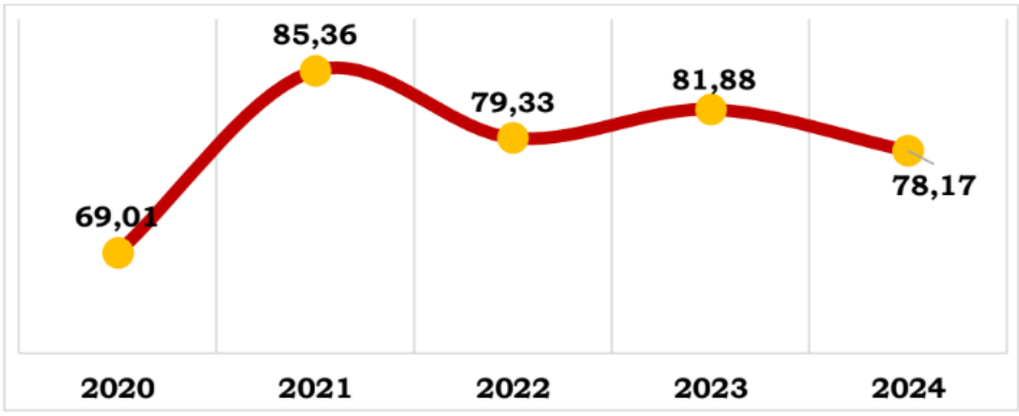

Sumber: Kemendagri, 2025

Gambar 2.2. IPKD Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Dalam implementasinya, IPKD dihitung berdasarkan beberapa aspek utama, seperti kualitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, efektivitas optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dengan adanya IPKD, pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap sejauh mana daerah mampu mengelola keuangan dengan baik serta mengidentifikasi kendala yang perlu diperbaiki.

Naiknya IPKD menandakan bahwa tata kelola keuangan daerah semakin baik, yang dapat diartikan sebagai adanya peningkatan dalam perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta efektivitas dalam realisasi belanja. Sebaliknya, turunnya IPKD mengindikasikan adanya kendala atau tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penurunan pendapatan, inefisiensi dalam belanja, atau lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Fluktuasi dalam IPKD juga dapat menjadi refleksi dari bagaimana pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, Kota Semarang dapat meningkatkan stabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal, kesejahteraan Masyarakat meningkat, serta daya saing daerah semakin kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Kinerja pada unsur penunjang keuangan dapat ditunjukkan dengan Ketepatan waktu penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap

tahun. Telah dilakukan pembahasan bersama dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Semarang sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 tanggal 20 Desember 2024.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan per 7 Februari 2025, Belanja Daerah Kota Semarang tahun 2024 tercatat mencapai 92,37% mengalami penurunan dari 2023 sebesar 93,05%. Hal tersebut disebabkan pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar dan menyesuaikan dengan *E-Catalog*, SHS dan ASB Kota Semarang serta penggunaan anggaran belanja tidak terduga hanya bisa untuk membiayai kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak dengan klasifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir maka pada tanggal 7 Juni 2024 Kepala Daerah telah mengirimkan Surat Permohonan Pembahasan untuk mendapat Persetujuan Bersama DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer yang ditargetkan 100% mencapai 100,54%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 98,65%. Peningkatan realisasi pendapatan dana transfer dikarenakan salur Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 100% sesuai dengan kondisi perekonomian nasional yang semakin membaik dan pelaporan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) setiap semester oleh Pemerintah Kota Semarang semakin tertib.

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan sebesar 55,15% sedangkan rasio pendapatan transfer sebesar 44,85% terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan Kota Semarang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pendapatan transfer digunakan untuk belanja dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

BPKAD Kota Semarang memiliki peran penting dalam penganggaran, realisasi anggaran, transparansi, dan administrasi keuangan, yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan program-program Pengarustamaan Gender, Anggaran Responsif Gender, dan Kota Layak Anak. Peran BPKAD lebih bersifat pendukung (finansial, administratif, dan regulasi anggaran) daripada sebagai pelaksana langsung program Pengarustamaan Gender, Anggaran Responsif Gender, dan Kota Layak Anak.

Tingkat capaian kinerja BPKAD Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan keuangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Semarang Tahun 2020 – 2024
(Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan																		
2	Hasil Opini BPK	Opini			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks			N/A	79,5	80	80,5	81	69,01	85,35	79,33	81,88	78,16	100,00%	107,36%	99,16%	101,71%	96,49%
4	Sasaran																		
5	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan OPD dengan Laporan Keuangan APBD Kota Semarang	%			100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase Nilai Pemanfaatan Aset	%			N/A	65	75	85	100	N/A	65	100	N/A	N/A	N/A	100,00%	133,33%	N/A	N/A
7	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	%			N/A	95	95,3	95,7	96	98,11	96,42	97,79	97,88	97,46	100,00%	101,50%	102,61%	102,28%	101,52%
8	Persentase Nilai Aset yang Dikelola	%			N/A	N/A	89,5	90	96	N/A	N/A	89,77	98,54	98,88	N/A	N/A	100,30%	109,49%	103,00%
9	Nilai SAKIP	Nilai			N/A	79	80	81	81,03	72,93	72,93	78,21	80	80,75	100,00%	92,32%	97,76%	98,77%	99,65%
10	Program																		
11	Persentase SILPA Terhadap APBD	%			N/A	1,62	1,42	1,22	1,02	N/A	6,5	5,17	6,02	5,01	N/A	301,23%	264,08%	393,44%	391,18%
12	Persentase Legalitas Aset	%			N/A	60,96	70,72	80,48	90,24	N/A	60,96	70,72	100	100	N/A	100,00%	100,00%	124,25%	110,82%
13	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	%			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	%			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	%			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	%			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17	Indikator Kinerja Daerah																		
18	Persentase SILPA terhadap APBD	%			N/A	1,62	1,42	1,22	1,02	N/A	6,5	5,17	6,02	5,01	N/A	301,23%	264,08%	393,44%	391,18%
19	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan																		
20	Persentase Serapan APBD	%		100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,27	93,36	93,64	92,37	N/A	89,27%	93,36%	93,64%	92,37%

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPKAD Kota Semarang

Pada bagian ini menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran BPKAD Kota Semarang, perkembangan rasio antara realisasi dan anggaran pencapaian target realisasi anggaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran BPKAD Kota Semarang. Hasil interprestasi ini untuk menggambarkan potensi dan permasalahan anggaran pelayanan BPKAD Kota Semarang.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	55.225.679.839	16.536.009.709	17.796.374.150	22.300.929.592	N/A	31.902.317.616	14.428.994.077	10.656.465.099	8.409.421.760	N/A	57,77%	87,26%	59,88%	37,71%	-12,37%	-34,00%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	N/A	2.992.267.153	2.582.031.801	2.973.969.530	3.404.886.112	N/A	2.268.148.893	2.272.070.704	2.736.933.213	2.995.172.507	N/A	75,80%	88,00%	92,03%	87,97%	5,32%	10,02%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	N/A	1.032.092.195	1.585.061.000	1.953.202.300	1.225.079.666	N/A	804.923.757	1.298.027.997	1.483.829.489	861.418.488	N/A	77,99%	81,89%	75,97%	70,32%	13,17%	11,21%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	N/A	904.254.554	2.096.978.900	1.752.838.500	1.584.368.000	N/A	623.494.702	1.517.126.381	1.252.706.797	1.225.164.735	N/A	68,95%	72,35%	71,47%	77,33%	35,29%	41,23%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	50.297.065.937	10.271.938.008	11.116.363.820	16.086.595.814	N/A	28.205.750.264	9.341.768.995	5.182.995.600	3.327.666.030	N/A	56,08%	90,94%	46,62%	20,69%	-8,88%	-49,06%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	N/A	5.379.316.084	4.703.641.385	4.536.608.902	3.267.750.443	N/A	4.406.328.251	3.438.780.246	3.928.238.955	3.002.144.473	N/A	81,91%	73,11%	86,59%	91,87%	-14,69%	-10,43%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	N/A	5.379.316.084	4.703.641.385	4.536.608.902	3.267.750.443	N/A	4.406.328.251	3.438.780.246	3.928.238.955	3.002.144.473	N/A	81,91%	73,11%	86,59%	91,87%	-14,69%	-10,43%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	156.544.378.617	97.555.468.917	107.396.041.061	105.695.528.582	N/A	140.872.014.022	94.838.408.665	104.768.926.312	102.607.269.923	N/A	89,99%	97,21%	97,55%	97,08%	-9,73%	-8,09%
Perencanaan, Penganggaran,	N/A	88.256.372	26.304.960	17.814.380	70.202.000	N/A	68.029.178	14.871.380	12.600.800	64.412.314	N/A	77,08%	56,53%	70,73%	91,75%	63,87%	105,92%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	68.768.283.366	11.792.120.903	11.950.204.156	12.038.696.200	N/A	62.851.969.004	11.236.598.890	11.391.439.593	11.666.483.057	N/A	91,40%	95,29%	95,32%	96,91%	-26,92%	-26,11%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	577.266.400	238.793.572	109.595.029	142.723.190	N/A	188.830.400	72.735.600	45.133.940	114.843.073	N/A	32,71%	30,46%	41,18%	80,47%	-27,50%	18,34%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	1.996.535.235	1.840.465.536	2.464.002.246	2.384.137.336	N/A	1.269.105.251	1.413.236.809	1.938.786.721	2.069.367.693	N/A	63,57%	76,79%	78,68%	86,80%	7,61%	18,43%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	37.125.000	146.736.366	435.217.320	645.965.946	N/A	26.100.000	131.130.500	367.500.000	577.985.000	N/A	70,30%	89,36%	84,44%	89,48%	180,09%	213,32%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	84.477.834.874	82.746.645.620	91.524.375.143	88.659.344.225	N/A	76.206.978.081	81.365.254.491	90.287.792.919	87.160.249.197	N/A	90,21%	98,33%	98,65%	98,31%	1,81%	4,76%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	599.077.370	764.401.960	894.832.787	1.754.459.685	N/A	261.002.108	604.580.995	725.672.339	953.929.589	N/A	43,57%	79,09%	81,10%	54,37%	46,91%	61,04%

c. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Mitra BPKAD Kota Semarang dalam memberikan pelayanan bekerja sama dengan:

1) Kementerian Dalam Negeri

Terlibat dalam pelaksanaan kebijakan umum keuangan daerah, penyusunan regulasi keuangan daerah, dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2) Kementerian Keuangan

Terlibat dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan pelaporan keuangan berbasis akrual serta pengelolaan dana transfer ke daerah.

3) Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng)

Terlibat dalam pengelolaan kas dan penerimaan daerah, penetapan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta penyaluran belanja daerah.

4) Akademisi/Pakar

Terlibat dalam memberikan pelatihan, seminar, bimbingan teknis, terkait penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan manajemen BMD.

5) Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Terlibat dalam pengelolaan BMD berupa tanah seperti pengukuran dan pensertifikatan atas nama Pemerintah Kota Semarang.

d. Inovasi Perangkat Daerah

Pada bagian ini di jelaskan Inovasi yang sudah dikembangkan atau diterapkan oleh Perangkat Daerah dalam periode lalu. Beberapa aplikasi pendukung yang dikembangkan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

1) SiKasda

Sistem Informasi Kasda Online menyajikan Laporan Kas Daerah atas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Semarang yang dapat dipergunakan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan rekonsiliasi dengan berbagai stakeholder, evaluasi kinerja stakeholder dan menjadi landasan dasar bagi proses pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan integrasi aplikasi Sistem Kasda Online dengan Bank Jateng secara *real time* dengan penyediaan bank data tersendiri sehingga Kasda Online dapat diakses secara *real time* oleh pemangku kepentingan dan menghasilkan Laporan Kas Daerah yang lebih cepat, aman, efisien, akurat, dan akuntabel.

Gambar 2.3. SiKasda

2) SEMAR

Aplikasi Sistem Elektronik Manajemen Aset Terintegrasi (SEMAR) bertujuan untuk mengumpulkan data kerjasama pemanfaatan aset di

Kota Semarang, mempermudah mencari data akan aset tanah Kota Semarang yang idle, serta membantu pengarsipan data pemanfaatan, penatausahaan, dan pengamanan aset. Menu yang terdapat pada aplikasi SEMAR yaitu Pemanfaatan Aset dengan sub menu daftar perjanjian, perjanjian akan jatuh tempo, dan pembayaran telah jatuh tempo. Menu penatausahaan aset terdiri dari sub menu peta digital, daftar aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan, ada pula sub menu sistem informasi persediaan.

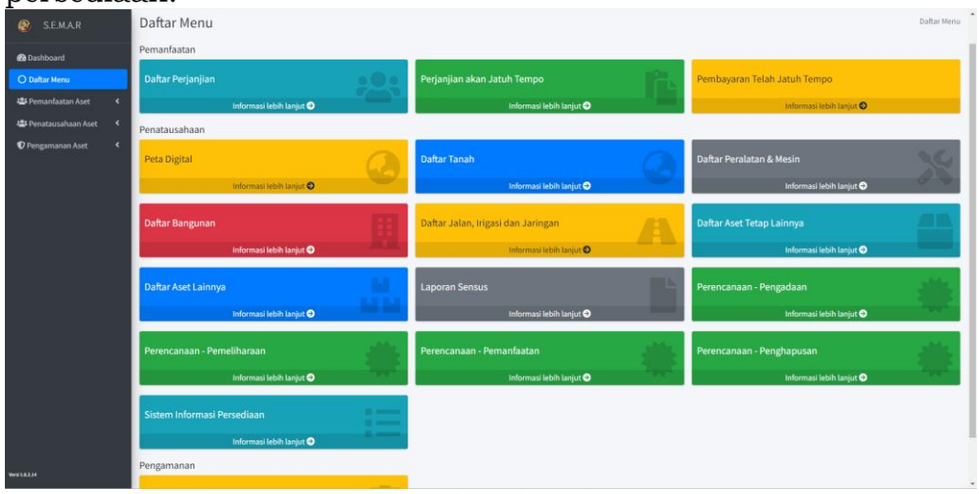

Gambar 2.4. SEMAR

3) E-Sewa BMD

E-Sewa Barang Milik Daerah merupakan *platform* untuk mengetahui dan menyewa asset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang.

Gambar 2.5. E-Sewa BMD

4) Si Evelin

Si Evelin (Sistem Verifikasi Online) yang dirancang untuk mempercepat, menyederhanakan dan meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara yang sebelumnya dilakukan secara manual.

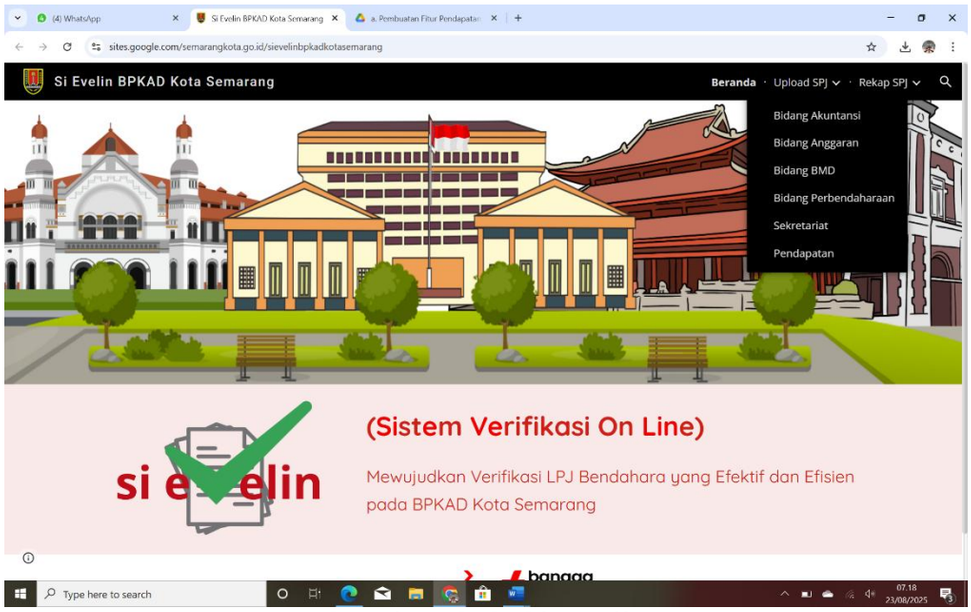

Gambar 2.6. Si Evelin

5) King Sulaiman

Dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan arsip surat menyurat yang lebih efektif dan efisien di Lingkungan BPKAD Kota Semarang.

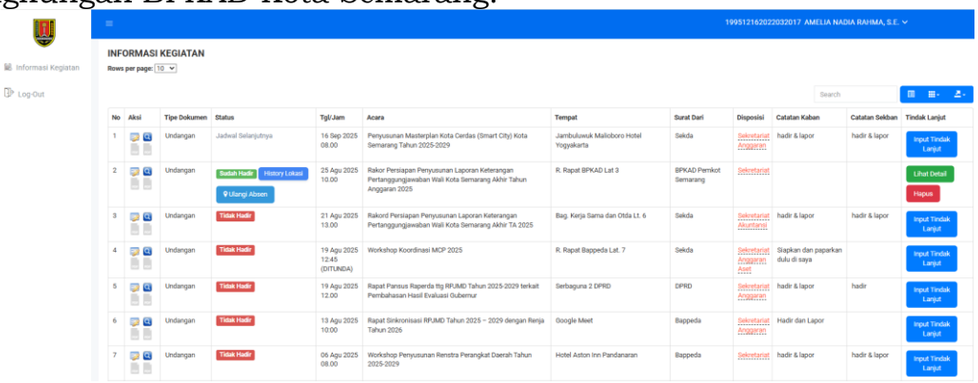

Gambar 2.7. King Sulaiman

e. Penghargaan Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Semarang meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sejak Tahun 2016-2024 dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2024 Kota Semarang menjadi *pilot project* dalam penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang pengukurannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan supervisi dari Kementerian Dalam Negeri dan memperoleh kategori Sangat Baik. Pada Tahun 2024 Kota Semarang telah melaksanakan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang pengukurannya dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dan memperoleh nilai A dengan predikat Baik.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKAD Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi BPKAD Kota Semarang sebagai berikut:

1) Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Kualitas perencanaan dan penganggaran masih sering terjadi ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan (RKPD, Renstra, KUA-PPAS) dengan APBD
b) Pengendalian dan akuntabilitas meliputi kesulitan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, terutama pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban
c) SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi menunjukkan perencanaan dan serapan anggaran yang belum optimal.

2) Tantangan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
a) Inventarisasi BMD karena terdapat BMD yang belum tercatat atau belum terdata dengan baik
b) Terdapat sengketa dan status hukum aset tanah/bangunan bermasalah dalam hal kepemilikan, sertifikasi, atau tumpang tindih dengan pihak lain
c) Pemanfaatan aset belum optimal karena terdapat aset daerah yang tidak produktif atau terbengkalai.

3) Tantangan Eksternal
a) Perubahan regulasi keuangan negara/daerah cukup dinamis, sehingga membutuhkan adaptasi cepat
b) Koordinasi lintas OPD masih lemah dalam sinkronisasi data, baik keuangan maupun BMD
c) Perubahan lingkungan global/nasional seperti inflasi, kondisi ekonomi nasional, dan kebijakan fiskal pusat turut memengaruhi ruang fiskal daerah.

b. Peluang

Peluang bagi BPKAD Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Peluang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
a) Pemanfaatan aplikasi SIPD RI untuk percepatan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
b) Pengendalian keuangan daerah melalui rekonsiliasi dan monitoring posisi kas daerah untuk mendukung transparansi keuangan melalui satu data
c) Perubahan rencana kerja agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan standar harga satuan agar lebih mencerminkan harga pasar sehingga mengurangi adanya SILPA

2) Peluang dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
a) Penjadwalan inventarisasi BMD setiap tahun untuk masing-masing jenis BMD untuk memastikan semua BMD tercatat secara terintegrasi
b) Koordinasi dengan pemangku wilayah, BPN, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mempercepat proses sertifikasi aset daerah
c) Digitalisasi dan publikasi informasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber tambahan PAD.

3) Peluang Eksternal
a) Peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat dan bimbingan teknis
b) Koordinasi secara rutin dengan OPD serta kolaborasi dengan *stakeholder* eksternal
c) Kolaborasi dengan swasta dan BUMD dalam pengelolaan keuangan dan BMD untuk beradaptasi dengan inflasi, kondisi ekonomi nasional, dan kebijakan fiskal pusat.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak memiliki relevansi langsung dengan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagaimana tertera dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029 berhubungan secara tidak langsung dengan pengelolaan keuangan dan aset yaitu dalam pilar Tata Kelola Kelembagaan dengan isu strategis Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab dapat dilakukan dengan terlabih dahulu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah “Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Jika masalah pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tidak segera diselesaikan, hal ini dapat mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, penurunan kepercayaan masyarakat, rendahnya kontribusi pendapatan dari aset daerah, serta meningkatnya risiko inefisiensi dan penyimpangan. Dampaknya, kualitas pelayanan publik menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan daya saing Kota Semarang melemah. Dari permasalahan utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdapat permasalahan dan akar masalah yang tertera pada gambar berikut:

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum BPKAD Kota Semarang maka dirumuskan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
BPKAD Kota Semarang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penganggaran Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran Daerah
		Belum Optimalnya Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
		Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran
		Belum Optimalnya Analisa Penunjang Keuangan
2	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Dana dan Belanja Daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan Dana Transfer
		Belum Optimalnya Layanan Penatausahaan Keuangan Daerah
		Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan oleh Perangkat Daerah
3	Belum Optimalnya Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Pemahaman Pengelola Keuangan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

		Belum Optimalnya Pembinaan terhadap Pengelola Keuangan
		Belum Optimalnya Analisa Akuntansi
4	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Belum Optimalnya Penataausahaan dan Pengamanan
		Belum Optimalnya Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
		Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Internal dalam Mendukung Kinerja Organisasi	Belum Optimalnya Pengelolaan Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kantor
		Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
		Belum Optimalnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030 yang tertuang dalam *Blue Print* Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk "NGOPENI. NGLAKONI. Jateng"

Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah: "JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045". Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1) Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2) Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5) Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6) Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Jawa Tengah tahun 2025–2029 didukung dengan program perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 khususnya BPKAD Provinsi Jawa Tengah salah satunya Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dibagi menjadi

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan

dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada akhir periode.

Berdasarkan visi dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dan mempertimbangkan evaluasi RPJMD Kota Semarang periode sebelumnya, serta mempertimbangkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi tersebut selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi Pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Toleran dan Berbudaya dalam Semangat Kebhinekaan, Ssrta Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian.
2) Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat yang Berfokus pada Kebutuhan Individu dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi.
3) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, dan Papan yang Merupakan Elemen Kunci agar Tercapai Taraf Hidup yang Layak.
4) Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya

Manusia dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ke Level Global

5) Mewujudkan Infrastruktur Kota yang Saling Terhubung dengan Peningkatan Aksesibilitas, dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan.
6) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, serta Dampaknya Bagi Masyarakat.
7) Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

BPKAD Kota Semarang mendukung pencapaian misi Pembangunan daerah ke 7 berkaitan pula dengan pokok visi Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif melalui Tujuan pada Misi 7 Pembangunan Daerah yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh Masyarakat. Tujuan Pembangunan yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut kemudian menjadi rumusan sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 salah satu indikatornya Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil. Indikator sasaran tersebut yang berhubungan dengan BPKAD Kota Semarang yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

c. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. BPKAD Kota Semarang secara tidak langsung berada pada pilar Tata Kelola Kelembagaan.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis BPKAD Kota Semarang

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu-isu global, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan regional, maka penetapan isu-isu strategis Kota Semarang pada RPJMD periode 2025-2029 yang berhubungan dengan BPKAD Kota Semarang yaitu Penyelenggaraan *Good Governance*. Penyelenggaraan *good governance* merupakan sebuah solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, tranparansi, dan mengedepankan akuntabiltas.

Potensi kewenangan BPKAD Kota Semarang terkait pengelolaan keuangan daerah yang prudent menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengelola

pendapatan dan belanja daerah secara transparan dan akuntabel dengan demikian pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mampu mendukung pencapaian target pembangunan, tetapi juga menjamin keberlanjutan fiskal serta memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Rumusan isu strategis pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Isu Perangkat Daerah
BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan APBD yang Prudent dalam Pencapaian Prioritas Daerah	1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penganggaran Daerah 2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Dana dan Belanja Daerah 3. Belum Optimalnya Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 4. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Internal dalam Mendukung Kinerja Organisasi	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	1. Kualitas Akuntabilitas Penganggaran Daerah untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Daerah 2. Pengelolaan Sumber Dana dan Belanja Daerah dalam Pencapaian Prioritas Daerah 3. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Tata Kelola Organisasi

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Kota Semarang dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis BPKAD Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kkota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal “Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah”.

Dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Kredibel”. Pengelolaan keuangan yang sehat dan kredibel adalah sistem pengelolaan keuangan yang dimulai dari proses perencanaan, pengelolaan dan pengendalian yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya berdasarkan pada prinsip-prinsip konsistensi, integritas, dan kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku, untuk memastikan stabilitas keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kepentingan. Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari BPKAD Kota Semarang, yaitu “Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Indikator ini diukur dari beberapa aspek sesuai dengan Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari BPKAD Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas

dan fungsi BPKAD Kota Semarang, dimana BPKAD mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa penyusunan anggaran daerah, pelaksanaan perbendaharaan, kegiatan akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan BMD saling memiliki keterkaitan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD terkait peningkatan kualitas layanan BPKAD.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Pemerintahan yang Responsif dan Berorientasi Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Kredibel		Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	98	98	98	98	98	98	Definisi Operasional: Dimensi Transparansi: Dinilai berdasarkan Ketepatan waktu dan Keteraksesan dokumen pada website Jika sesuai ketepatan waktu dan keteraksesan dokumen pada website masing-masing mendapat skor 1, jika tidak sesuai ketepatan waktu dan keteraksesan dokumen pada website masing-masing mendapat skor 0 Dimensi Penyerapan Anggaran: Terdapat 2 indikator yaitu belanja operasi dan belanja modal Jika capaian belanja di atas 80% mendapat skor 1, jika capaian belanja di bawah 80% mendapat skor 0 Dimensi Opini BPK: Opini WTP 3 tahun berturut-turut diberi skor 1 Sumber: Permendagri 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatnya Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	81,5	81,55	81,6	81,65	81,7	81,75	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Semarang
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks	90	90,5	91	91,5	92	92,5	Penilaian melalui AsikMas milik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kota Semarang. Dari hasil analisis tersebut dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah ditetapkan beberapa sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dalam Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran–sasaran tersebut kemudian dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Daerah

   Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi sebagai berikut:

   a. Peningkatan Penyelenggaraan Penganggaran Daerah yang Transparan dan Akuntabel
   b. Peningkatan Pengelolaan Sumber Dana dan Belanja Daerah yang Efisien dan Efektif
   c. Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah yang Akuntabel
   d. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Transparan, Efisien, dan Akuntabel

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah

   Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal dalam Mendukung Kinerja Organisasi.

Penahapan strategi dijabarkan seperti pada tabel:

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan Penyelenggaraan Penganggaran Daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Penyelenggaraan Penganggaran Daerah yang transparan dan akuntabel	Penguatan Penyelenggaraan Penganggaran Daerah yang transparan dan akuntabel	Percepatan Penyelenggaraan Penganggaran Daerah yang transparan dan akuntabel	Perwujudan Penyelenggaraan Penganggaran Daerah yang transparan dan akuntabel
Pengembangan Pengelolaan Belanja Daerah yang efisien dan efektif	Peningkatan Pengelolaan Belanja Daerah yang efisien dan efektif	Penguatan Pengelolaan Belanja Daerah yang efisien dan efektif	Percepatan Pengelolaan Belanja Daerah yang efisien dan efektif	Perwujudan Pengelolaan Belanja Daerah yang efisien dan efektif
Pengembangan Mekanisme Pelaporan Keuangan Daerah yang akuntabel	Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah yang akuntabel	Penguatan Pelaporan Keuangan Daerah yang akuntabel	Percepatan Pelaporan Keuangan Daerah yang akuntabel	Perwujudan Pelaporan Keuangan Daerah yang akuntabel
Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel	Penguatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel	Percepatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel	Perwujudan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel
Pengembangan Layanan Internal	Peningkatan Layanan Internal	Penguatan Layanan Internal	Percepatan Layanan Internal	Perwujudan Layanan Internal

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
dalam Mendukung Kinerja Organisasi	dalam Mendukung Kinerja Organisasi	dalam Mendukung Kinerja Organisasi	dalam Mendukung Kinerja Organisasi	dalam Mendukung Kinerja Organisasi

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada BPKAD Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra BPKAD Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra BPKAD Kota Semarang.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	Penyusunan Dokumen Penganggaran Daerah yang Berkualitas	Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan
			Peningkatan Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	
			Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran yang Berkualitas	
			Peningkatan Kualitas Analisa Penunjang Keuangan	
			Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Bidang Perbendaharaan
			Peningkatan Layanan Penatausahaan Keuangan Daerah	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana Penatausahaan Keuangan	
			Pengembangan Kebijakan serta Sistem dan Prosedur Informasi Akuntansi	Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi
			Penguatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	
			Penguatan Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Perencanaan dan Penganggaran	
			Pengoptimalan Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bidang Barang Milik Daerah
			Pembinaan Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peningkatan Legalisasi Tanah Milik Daerah	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah	
			Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian sesuai dengan Analisis Jabatan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor	Sekretariat
			Peningkatan Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi BPKAD Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Teknik merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan BPKAD Kota Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
Meningkatnya Pemerintahan yang Responsif dan Berorientasi Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Kredibel				Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Kepala BPKAD
		Meningkatnya Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Daerah			Opini BPK		Kepala BPKAD
			Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Penyusunan APBD		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan
			Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran		Persentase Realisasi Belanja		Kepala Bidang Perbendaharaan
			Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan		Kepala Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi
				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Sub. Bid. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Penganggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Anggaran dan Pelaksanaan Pembinaan Penganggaran Perangkat Daerah		Sub. Bid. Kebijakan dan Pembinaan Anggaran
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Penunjang Keuangan	Persentase Tersusunnya Dokumen Penunjang Keuangan		Subkoord. Perencanaan Anggaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kualitas Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Presentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran		Sub. Bid. Perimbangan dan Pendapatan
				Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Sub. Bid. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran - Staf Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan
				Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Sub. Bid. Kebijakan dan Pembinaan Anggaran - Staf Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Subkoord. Perencanaan Anggaran - Staf Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
				Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- Sub. Bid. Perimbangan dan Pendapatan - Staf Bidang Perbendaharaan
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer	Persentase Pengelolaan Dana Transfer	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Sub. Bid. Perimbangan dan Pendapatan
				Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah	Presentase Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah		Sub. Bid. Belanja Daerah
				Meningkatnya Pemahaman Perangkat Daerah atas Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang Memahami dan Menerapkan Penatausahaan Keuangan Sesuai Regulasi		akan didelegasikan ke pihak yang ditunjuk Eselon II
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Sub. Bid. Perimbangan dan Pendapatan - Staf Bidang Perbendaharaan
				Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
				Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Sub. Bid. Belanja Daerah - Staf Bidang Perbendaharaan
				Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- akan didelegasikan ke pihak yang ditunjuk Eselon II
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Sub. Bid. Pelaporan Keuangan Daerah
				Meningkatnya Pemahaman Perangkat Daerah Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan		Sub. Bid. Analisis Akuntansi
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tepat Waktu		Subkoord. Analisa
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Sub. Bid. Pelaporan Keuangan Daerah - Staf Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
				Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
				Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Sub. Bid. Analisis Akuntansi - Staf Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi
				Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	- Subkoord. Analisa - Staf Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
				Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya Pelayanan Pencairan Dana Darurat dan Mendesak sesuai dengan Ketentuan	Presentase Pencairan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan Ketentuan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Sub. Bid. Perimbangan dan Pendapatan
				Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Sub. Bid. Perimbangan dan Pendapatan - Staf Bidang Perbendaharaan
			Meningkatnya Pengelolaan Barang		Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Barang Milik Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Milik Daerah yang Efisien dan Akuntabel				
				Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub. Bid. Penataausahaan dan Pengamanan
				Meningkatnya Pemahaman Prangkat Daerah, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah		Sub. Bid. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Kebijakan Barang Milik Daerah		akan didelegasikan ke pihak yang ditunjuk Eselon II
				Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga	- Sub. Bid. Penataausahaan dan Pengamanan - Staf Bidang Barang Milik Daerah
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Sub. Bid. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian - Staf Bidang Barang Milik Daerah
				Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan Pengendalian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- akan didelegasikan ke pihak yang ditunjuk Eselon II
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Kepala BPKAD
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Kepala BPKAD
			Terwujudnya Pelayanan Internal yang Berkualitas dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
					Persentase Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah	akan didelegasikan ke pihak yang ditunjuk Eselon II
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- akan didelegasikan ke pihak yang ditunjuk Eselon II
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub. Bag. Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Sub. Bag. Keuangan dan Barang Milik Daerah - Staf Sekretariat
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian - Staf Sekretariat
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian - Staf Sekretariat
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian - Staf Sekretariat
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian - Staf Sekretariat
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	- Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian - Staf Sekretariat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

BPKAD Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas Kepala Daerah yaitu Digitalisasi manajemen keuangan daerah. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas BPKAD Kota Semarang dalam Mendukung Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Digitalisasi Manajemen Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.	
2	Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset	Inventarisasi Aset Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	-		

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Kota Semarang

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Badan Penglolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang				173.231.362.809		191.855.786.053		199.962.001.958		201.450.998.632		204.963.233.424	
5.02 Keuangan				173.231.362.809		191.855.786.053		199.962.001.958		201.450.998.632		204.963.233.424	
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah				60.091.407.455		65.919.837.339		71.456.641.320		76.522.616.164		81.821.754.320	
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Penyusunan APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100%	100%	3.231.586.697	100%	3.754.497.524	100%	4.092.684.032	100%	4.134.248.183	100%	4.322.705.222	
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.231.586.697		3.754.497.524		4.092.684.032		4.134.248.183		4.322.705.222	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	1.334.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.691.000.000	100%	1.704.000.000	100%	1.781.000.000	
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				129.000.000		150.000.000		163.000.000		165.000.000		170.000.000	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	129.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	163.000.000	2 Dokumen	165.000.000	2 Dokumen	170.000.000	
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				140.000.000		162.000.000		180.000.000		184.000.000		190.000.000	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000	2 Dokumen	162.000.000	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	184.000.000	2 Dokumen	190.000.000	
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				581.000.000		675.000.000		735.000.000		740.000.000		778.000.000	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	3 Dokumen	581.000.000	3 Dokumen	675.000.000	3 Dokumen	735.000.000	3 Dokumen	740.000.000	3 Dokumen	778.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				484.000.000		563.000.000		613.000.000		615.000.000		643.000.000	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	3 Dokumen	484.000.000	3 Dokumen	563.000.000	3 Dokumen	613.000.000	3 Dokumen	615.000.000	3 Dokumen	643.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Penganggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Anggaran dan Pelaksanaan Pembinaan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	100%	1.812.586.697	100%	2.104.497.524	100%	2.294.684.032	100%	2.314.448.183	100%	2.418.705.222	
5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1.619.386.697		1.880.797.524		2.050.684.032		2.068.348.183		2.164.405.222	
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	1.619.386.697	12 Dokumen	1.880.797.524	12 Dokumen	2.050.684.032	12 Dokumen	2.068.348.183	12 Dokumen	2.164.405.222	
5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				3.200.000		3.700.000		4.000.000		4.100.000		4.300.000	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.200.000	2 Dokumen	3.700.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.100.000	2 Dokumen	4.300.000	
5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				190.000.000		220.000.000		240.000.000		242.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	190.000.000	200 Orang	220.000.000	200 Orang	240.000.000	200 Orang	242.000.000	200 Orang	250.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Penunjang Keuangan	Persentase Tersusunnya Dokumen Penunjang Keuangan	100%	100%	61.000.000	100%	75.000.000	100%	82.000.000	100%	90.800.000	100%	98.000.000	
5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				36.000.000		48.000.000		52.000.000		55.800.000		60.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	36.000.000	2 Dokumen	48.000.000	2 Dokumen	52.000.000	2 Dokumen	55.800.000	2 Dokumen	60.000.000	
5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				25.000.000		27.000.000		30.000.000		35.000.000		38.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	38.000.000	
Meningkatnya Kualitas Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Presentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	24.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				24.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	24.000.000	52 Dokumen	25.000.000	52 Dokumen	25.000.000	52 Dokumen	25.000.000	52 Dokumen	25.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran	Persentase Realisasi Belanja	92,37%	93,43%	55.688.797.044	93,53%	60.803.777.227	94,93%	65.878.929.785	95,74%	70.888.166.263	96,55%	75.930.045.605	
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				688.797.044		803.777.227		878.929.785		888.166.263		930.045.605	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer	Persentase Pengelolaan Dana Transfer	100,54%	100%	415.000.000	100%	490.000.000	100%	525.000.000	100%	531.000.000	100%	553.025.000	
5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				100.000.000		120.000.000		123.000.000		125.000.000		130.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	754 Dokumen	1016 Dokumen	100.000.000	1016 Dokumen	120.000.000	1016 Dokumen	123.000.000	1016 Dokumen	125.000.000	1016 Dokumen	130.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengelolaan Kas Daerah	Pengelolaan Kas Daerah												
5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				145.000.000		160.000.000		170.000.000		172.000.000		180.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	91 Dokumen	145.000.000	91 Dokumen	160.000.000	91 Dokumen	170.000.000	91 Dokumen	172.000.000	91 Dokumen	180.000.000	
5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				60.000.000		75.000.000		80.000.000		81.000.000		83.025.000	
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dokumen	24 Dokumen	60.000.000	24 Dokumen	75.000.000	24 Dokumen	80.000.000	24 Dokumen	81.000.000	24 Dokumen	83.025.000	
5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				60.000.000		75.000.000		80.000.000		81.000.000		85.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	81.000.000	2 Laporan	85.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)												
5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				50.000.000		60.000.000		72.000.000		72.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	16 Dokumen	50.000.000	16 Dokumen	60.000.000	16 Dokumen	72.000.000	16 Dokumen	72.000.000	16 Dokumen	75.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah	Presentase Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	117.000.000	100%	120.000.000	
5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				100.000.000		110.000.000		115.000.000		117.000.000		120.000.000	
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen	20000 Dokumen	100.000.000	21000 Dokumen	110.000.000	22000 Dokumen	115.000.000	23000 Dokumen	117.000.000	24000 Dokumen	120.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													
Meningkatnya Pemahaman Perangkat Daerah atas Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang Memahami dan Menerapkan Penatausahaan Keuangan Sesuai Regulasi	100%	100%	173.797.044	100%	203.777.227	100%	238.929.785	100%	240.166.263	100%	257.020.605	
5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				173.797.044		203.777.227		238.929.785		240.166.263		257.020.605	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 orang	800 Orang	173.797.044	800 Orang	203.777.227	800 Orang	238.929.785	800 Orang	240.166.263	800 Orang	257.020.605	
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				55.000.000.000		60.000.000.000		65.000.000.000		70.000.000.000		75.000.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Pencairan Dana Darurat dan Mendesak sesuai dengan Ketentuan	Presentase Pencairan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	55.000.000.000	100%	60.000.000.000	100%	65.000.000.000	100%	70.000.000.000	100%	75.000.000.000	
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				55.000.000.000		60.000.000.000		65.000.000.000		70.000.000.000		75.000.000.000	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000.000	12 Laporan	60.000.000.000	12 Laporan	65.000.000.000	12 Laporan	70.000.000.000	12 Laporan	75.000.000.000	
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan	100%	100%	1.171.023.714	100%	1.361.562.588	100%	1.485.027.503	100%	1.500.201.718	100%	1.569.003.493	
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.171.023.714		1.361.562.588		1.485.027.503		1.500.201.718		1.569.003.493	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	477.408.899	100%	555.088.757	100%	605.423.561	100%	611.609.862	100%	639.659.319	
5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				21.673.380		25.199.886		27.484.983		27.765.829		29.039.215	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	612 Laporan	624 Laporan	21.673.380	624 Laporan	25.199.886	624 Laporan	27.484.983	624 Laporan	27.765.829	624 Laporan	29.039.215	
5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				75.094.823		87.313.605		95.231.101		96.204.185		100.616.271	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	75.094.823	12 Dokumen	87.313.605	12 Dokumen	95.231.101	12 Dokumen	96.204.185	12 Dokumen	100.616.271	
5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				159.554.829		185.516.214		202.338.609		204.406.132		213.780.542	
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	159.554.829	12 Laporan	185.516.214	12 Laporan	202.338.609	12 Laporan	204.406.132	12 Laporan	213.780.542	
5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				221.085.867		257.059.052		280.368.868		283.233.716		296.223.291	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	221.085.867	12 Laporan	257.059.052	12 Laporan	280.368.868	12 Laporan	283.233.716	12 Laporan	296.223.291	
Meningkatnya Pemahaman Perangkat Daerah Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	233.346.348	100%	271.314.452	100%	295.916.931	100%	298.940.651	100%	312.650.572	
5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				68.254.089		79.359.805		86.556.060		87.440.502		91.450.670	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	68.254.089	6 Dokumen	79.359.805	6 Dokumen	86.556.060	6 Dokumen	87.440.502	6 Dokumen	91.450.670	
5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				77.849.509		90.516.509		98.724.441		99.733.221		104.307.154	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	77.849.509	250 Orang	90.516.509	250 Orang	98.724.441	250 Orang	99.733.221	250 Orang	104.307.154	
5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				87.242.750		101.438.138		110.636.430		111.766.928		116.892.748	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	39 Lembaga	87.242.750	39 Lembaga	101.438.138	39 Lembaga	110.636.430	39 Lembaga	111.766.928	39 Lembaga	116.892.748	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Keuangan BLUD Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Kualitas Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tepat Waktu	100%	100%	460.268.467	100%	535.159.379	100%	583.687.011	100%	589.651.205	100%	616.693.602	
5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				187.554.417		218.071.653		237.846.138		240.276.482		251.295.966	
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	187.554.417	4 Dokumen	218.071.653	4 Dokumen	237.846.138	4 Dokumen	240.276.482	4 Dokumen	251.295.966	
5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				39.365.201		45.770.366		49.920.770		50.430.867		52.743.712	
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	39.365.201	1 Dokumen	45.770.366	1 Dokumen	49.920.770	1 Dokumen	50.430.867	1 Dokumen	52.743.712	
5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				125.892.132		146.376.214		159.649.439		161.280.759		168.677.366	
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	125.892.132	1 Dokumen	146.376.214	1 Dokumen	159.649.439	1 Dokumen	161.280.759	1 Dokumen	168.677.366	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Akuntansi Pemerintah Daerah	Akuntansi Pemerintah Daerah												
5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				107.456.717		124.941.146		136.270.664		137.663.097		143.976.558	
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	107.456.717	1 Dokumen	124.941.146	1 Dokumen	136.270.664	1 Dokumen	137.663.097	1 Dokumen	143.976.558	
5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.581.394.446		3.960.290.310		4.125.203.427		4.155.495.623		4.226.948.640	
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efisien dan Akuntabel	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	3.581.394.446	100%	3.960.290.310	100%	4.125.203.427	100%	4.155.495.623	100%	4.226.948.640	
5.02.03.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.581.394.446		3.960.290.310		4.125.203.427		4.155.495.623		4.226.948.640	
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.023.435.688	100%	1.149.734.310	100%	1.204.705.349	100%	1.214.802.747	100%	1.238.620.419	
5.02.03.01.0001 Penyusunan Standar Harga				123.435.688		149.734.310		149.734.310		149.734.310		149.734.310	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	123.435.688	1 Dokumen	149.734.310	1 Dokumen	149.734.310	1 Dokumen	149.734.310	1 Dokumen	149.734.310	
5.02.03.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		123.817.672	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	123.817.672	
5.02.03.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah				300.000.000		300.000.000		354.971.039		365.068.437		365.068.437	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	354.971.039	4 Laporan	365.068.437	4 Laporan	365.068.437	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.02.03.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah				550.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan	11 Laporan	550.000.000	11 Laporan	600.000.000	11 Laporan	600.000.000	11 Laporan	600.000.000	11 Laporan	600.000.000	
Meningkatnya Pemahaman Prangkat Daerah, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	100%	100%	2.457.958.758	100%	2.660.556.000	100%	2.770.498.078	100%	2.790.692.876	100%	2.838.328.221	
5.02.03.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah				975.000.000		1.036.298.621		1.036.298.621		1.046.396.020		1.070.213.692	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	975.000.000	10 Laporan	1.036.298.621	10 Laporan	1.036.298.621	10 Laporan	1.046.396.020	10 Laporan	1.070.213.692	
5.02.03.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah				890.000.000		915.000.000		969.971.039		969.971.039		993.788.712	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	10 Laporan	890.000.000	10 Laporan	915.000.000	10 Laporan	969.971.039	10 Laporan	969.971.039	10 Laporan	993.788.712	
5.02.03.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				102.958.758		129.257.379		129.257.379		139.354.778		139.354.778	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	10 Laporan	102.958.758	10 Laporan	129.257.379	10 Laporan	129.257.379	10 Laporan	139.354.778	10 Laporan	139.354.778	
5.02.03.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				475.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	12 Dokumen	12 Dokumen	475.000.000	12 Dokumen	550.000.000	12 Dokumen	550.000.000	12 Dokumen	550.000.000	12 Dokumen	550.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												
5.02.03.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				15.000.000		30.000.000		84.971.039		84.971.039		84.971.039	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	60 Orang	15.000.000	100 Orang	30.000.000	200 Orang	84.971.039	200 Orang	84.971.039	200 Orang	84.971.039	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Kebijakan Barang Milik Daerah	100%	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	
5.02.03.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				109.558.560.908		121.975.658.404		124.380.157.211		120.772.886.845		118.914.530.464	
Terwujudnya Pelayanan Internal yang Berkualitas dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	100%	100%	13.711.437.688	100%	14.500.433.298	100%	15.536.147.209	100%	16.245.236.995	100%	16.847.861.761	
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah				71.250.000		117.829.688		123.721.175		112.218.750		106.875.000	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta pelaporan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai	100%	100%	71.250.000	100%	117.829.688	100%	123.721.175	100%	112.218.750	100%	106.875.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
kinerja yang sesuai peraturan perundangan	peraturan perundangan												
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.500.000		7.441.875		7.813.968		7.087.500		6.750.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5 Dokumen	4.500.000	5 Dokumen	7.441.875	5 Dokumen	7.813.968	5 Dokumen	7.087.500	6 Dokumen	6.750.000	
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.100.000		5.126.625		5.382.957		4.882.500		4.650.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.000	1 Dokumen	5.126.625	1 Dokumen	5.382.957	1 Dokumen	4.882.500	1 Dokumen	4.650.000	
5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.700.000		6.118.875		6.424.819		5.827.500		5.550.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.700.000	1 Dokumen	6.118.875	1 Dokumen	6.424.819	1 Dokumen	5.827.500	1 Dokumen	5.550.000	
5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.100.000		6.780.375		7.119.394		6.457.500		6.150.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	6.780.375	1 Dokumen	7.119.394	1 Dokumen	6.457.500	1 Dokumen	6.150.000	
5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.100.000		5.126.625		5.382.957		4.882.500		4.650.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.000	1 Dokumen	5.126.625	1 Dokumen	5.382.957	1 Dokumen	4.882.500	1 Dokumen	4.650.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000		4.961.250		5.209.313		4.725.000		4.500.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	4.961.250	3 Laporan	5.209.313	3 Laporan	4.725.000	3 Laporan	4.500.000	
5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				49.750.000		82.274.063		86.387.767		78.356.250		74.625.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	49.750.000	1 Dokumen	82.274.063	1 Dokumen	86.387.767	1 Dokumen	78.356.250	1 Dokumen	74.625.000	
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.640.187.688		14.382.603.610		15.412.426.034		16.133.018.245		16.740.986.761	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	13.640.187.688	100%	14.382.603.610	100%	15.412.426.034	100%	16.133.018.245	100%	16.740.986.761	
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.043.777.688		13.396.290.572		14.376.797.341		15.093.672.495		15.846.371.761	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/Bulan	85 Orang/Bulan	13.043.777.688	85 Orang/Bulan	13.396.290.572	85 Orang/Bulan	14.376.797.341	85 Orang/Bulan	15.093.672.495	85 Orang/Bulan	15.846.371.761	
5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				595.510.000		984.824.663		1.034.065.897		1.037.928.250		893.265.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	595.510.000	12 Dokumen	984.824.663	12 Dokumen	1.034.065.897	12 Dokumen	1.037.928.250	12 Dokumen	893.265.000	
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				300.000		496.125		520.932		472.500		450.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000	1 Laporan	496.125	1 Laporan	520.932	1 Laporan	472.500	1 Laporan	450.000	
5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				300.000		496.125		520.932		472.500		450.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	0 Laporan	1 Laporan	300.000	1 Laporan	496.125	1 Laporan	520.932	1 Laporan	472.500	1 Laporan	450.000	
5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				300.000		496.125		520.932		472.500		450.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	300.000	1 Laporan	496.125	1 Laporan	520.932	1 Laporan	472.500	1 Laporan	450.000	
Terwujudnya Pelayanan Internal yang Berkualitas dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92%	92,50%	95.847.123.220	92,83%	107.475.225.106	93,17%	108.844.010.002	93,50%	104.527.649.850	93,83%	102.066.668.703	
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				126.000.000		1.038.372.500		1.095.615.934		798.450.000		189.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya	Nilai layanan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	N/A	85	126.000.000	85,66	1.038.372.500	86,34	1.095.615.934	87	798.450.000	87,66	189.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.000.000		106.653.750		111.986.438		101.575.000		1.500.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	106.653.750	1 Dokumen	111.986.438	1 Dokumen	101.575.000	1 Dokumen	1.500.000	
5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				125.000.000		931.718.750		983.629.496		696.875.000		187.500.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100 Orang	125.000.000	100 Orang	931.718.750	100 Orang	983.629.496	100 Orang	696.875.000	100 Orang	187.500.000	
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.858.000.000		5.781.942.902		6.521.040.049		3.601.850.383		2.087.000.000	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	100%	1.858.000.000	100%	5.781.942.902	100%	6.521.040.049	100%	3.601.850.383	100%	2.087.000.000	
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				272.500.000		840.396.875		882.416.719		324.187.500		308.750.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	272.500.000	8 Paket	840.396.875	8 Paket	882.416.719	8 Paket	324.187.500	8 Paket	308.750.000	
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.500.000		850.516.875		893.042.719		238.587.500		36.750.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket	2 Paket	24.500.000	2 Paket	850.516.875	2 Paket	893.042.719	2 Paket	238.587.500	2 Paket	36.750.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Penggandaan yang Disediakan												
5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		474.037.902		497.739.798		165.750.383		105.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36 Laporan	70.000.000	36 Laporan	474.037.902	36 Laporan	497.739.798	36 Laporan	165.750.383	36 Laporan	105.000.000	
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.500.000		1.027.451.875		1.078.824.469		883.287.500		650.750.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36 Laporan	500.500.000	36 Laporan	1.027.451.875	36 Laporan	1.078.824.469	36 Laporan	883.287.500	36 Laporan	650.750.000	
5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		1.458.125.000		1.681.031.250		912.500.000		150.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	1.458.125.000	2 Dokumen	1.681.031.250	2 Dokumen	912.500.000	2 Dokumen	150.000.000	
5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				890.500.000		1.131.414.375		1.487.985.094		1.077.537.500		835.750.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	890.500.000	3 Dokumen	1.131.414.375	3 Dokumen	1.487.985.094	3 Dokumen	1.077.537.500	3 Dokumen	835.750.000	
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				360.500.000		785.926.875		955.223.219		462.787.500		440.750.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	100%	360.500.000	100%	785.926.875	100%	955.223.219	100%	462.787.500	100%	440.750.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.899.996		27.194.996		28.554.746		29.982.483		31.481.607	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	25.899.996	1 Unit	27.194.996	1 Unit	28.554.746	1 Unit	29.982.483	1 Unit	31.481.607	
5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				334.600.004		758.731.879		926.668.473		432.805.017		409.268.393	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	230 Unit	40 Unit	334.600.004	40 Unit	758.731.879	40 Unit	926.668.473	40 Unit	432.805.017	40 Unit	409.268.393	
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.361.448.360		98.113.040.306		98.378.391.149		98.182.211.562		97.982.211.562	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	92.361.448.360	100%	98.113.040.306	100%	98.378.391.149	100%	98.182.211.562	100%	97.982.211.562	
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				91.789.568.120		97.293.392.952		97.517.761.427		97.201.595.034		97.201.595.034	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	91.789.568.120	12 Laporan	97.293.392.952	12 Laporan	97.517.761.427	12 Laporan	97.201.595.034	12 Laporan	97.201.595.034	
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				571.880.240		819.647.354		860.629.722		980.616.528		780.616.528	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	571.880.240	12 Laporan	819.647.354	12 Laporan	860.629.722	12 Laporan	980.616.528	12 Laporan	780.616.528	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.141.174.860		1.755.942.523		1.893.739.651		1.482.350.405		1.367.707.141	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	1.141.174.860	100%	1.755.942.523	100%	1.893.739.651	100%	1.482.350.405	100%	1.367.707.141	
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				49.910.050		82.538.745		136.665.683		78.608.329		74.865.075	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	49.910.050	1 Unit	82.538.745	1 Unit	136.665.683	1 Unit	78.608.329	1 Unit	74.865.075	
5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				430.764.810		911.851.903		957.444.499		678.454.576		602.092.066	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	45 Unit	430.764.810	45 Unit	911.851.903	45 Unit	957.444.499	45 Unit	678.454.576	45 Unit	602.092.066	
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				160.500.000		265.426.875		278.698.219		252.787.500		240.750.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	170 Unit	160.500.000	170 Unit	265.426.875	170 Unit	278.698.219	170 Unit	252.787.500	170 Unit	240.750.000	
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000		496.125.000		520.931.250		472.500.000		450.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	500.000.000	2 Unit	496.125.000	2 Unit	520.931.250	2 Unit	472.500.000	2 Unit	450.000.000	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja BPKAD Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	98	98	98	98	98	98	
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci BPKAD Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Silpa terhadap APBD	Persentase	3,27	3,17	3,07	3,02	2,97	2,92	
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur BPKAD Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan keuangan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab BPKAD Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra BPKAD Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPKAD Kota Semarang.

Permasalahan keuangan daerah dan barang milik daerah sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh BPKAD Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan BPKAD Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur BPKAD Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan BPKAD Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

32. BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang maka Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang Keuangan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

22. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Keuangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semaranf Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah membantu Walikota/Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, dan Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, dan Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, dan Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, dan Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

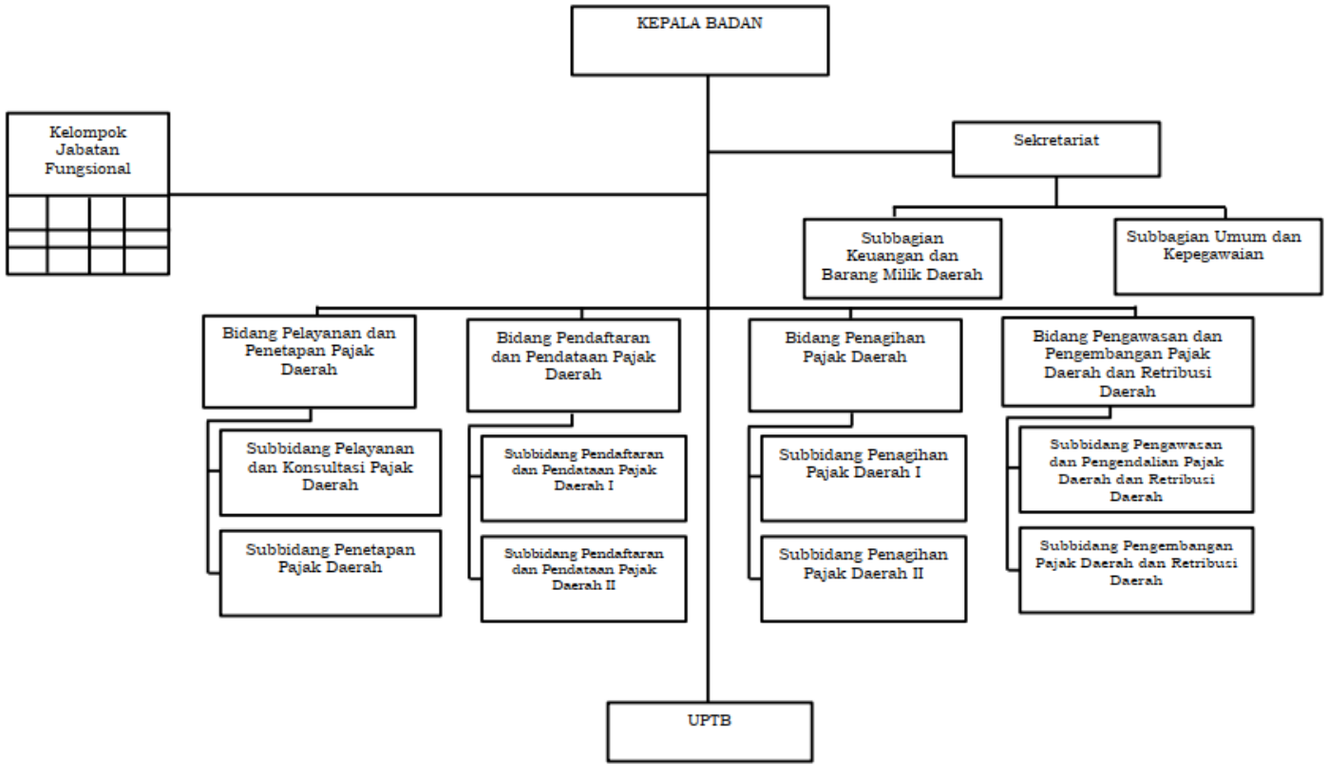

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

A. Kepala

Mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah

B. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan,mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan

Tugas Sekretaris meliputi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UPTB;
d. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UPTB;
e. pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Badan;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Badan;
h. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
j. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Badan;
m. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;
n. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;

o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan;
p. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan;
q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan;
r. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan;
s. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Badan;
t. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan;
u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
v. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan;
w. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan;
pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan;
x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
y. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah

Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Penetapan Pajak Daerah, dan Penyuluhan dan Penghargaan Pajak Daerah

Tugas Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak meliputi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
c. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah;
d. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pelayanan umum bagi wajib pajak daerah secara langsung dan terpadu dalam satu tempat pelayanan;
f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan pengaduan pajak daerah;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan dan langkah penanganan atas pengaduan wajib pajak daerah;
h. pelaksanaan kegiatan penetapan wajib pajak daerah;
i. pelaksanaan kegiatan penghitungan dan menyiapkanbahan penetapan pajak daerah;

j. pelaksanaan kegiatan penerbitan surat ketetapan atas objek pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB-P2;
k. pelaksanaan kegiatan pertimbangan terhadap pengajuan keberatan dan keringanan pajak daerah;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah;
m. pelaksanaan kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
n. pelaksanaan kegiatan pemberian keringanan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak daerah;
o. pelaksanaan kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah;
p. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
q. pelaksanaan kegiatan penentuan kriteria dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak;
r. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Penyuluhan dan Penghargaan Pajak Daerah;
s. pelaksanaan kegiatan penentuan kriteria dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak;
t. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Penyuluhan dan Penghargaan Pajak Daerah;
u. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah;
v. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah;
w. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan di Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pendaftaran dan Pendataan Pajak I, Pendaftaran dan Pendataan Pajak II, dan Perencanaan Pajak Daerah

Tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak meliputi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
e. pelaksanaan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan obyek Pajak Daerah;
f. pelaksanaan kegiatan penilaian Pajak Daerah;
g. pelaksanaan kegiatan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
h. pelaksanaan kegiatan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
i. pelaksanaan kegiatan verifikasi surat pemberitahuan objek dan subjek Pajak Daerah;

j. pelaksanaan kegiatan penyusunan buku induk wajib Pajak Daerah;
k. pelaksanaan kegiatan pendokumentasian hasil Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
l. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak dapelaksanaan kegiatan analisis potensi pajak daerah;
m. pelaksanaan kegiatan pengkajian Pendaftaran dan Pendataan pajak daerah;
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan Pajak Daerah;
o. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan Pajak Daerah;
p. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Penagihan Pajak Daerah

Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan sertamengevaluasi Penagihan Pajak Daerah I, Penagihan Pajak Daerah II, dan Pelaporan Pajak Daerah.

Tugas Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah meliputi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Penagihan Pajak Daerah;
e. pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Daerah;
f. pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan atas Penagihandan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
g. pelaksanaan kegiatan penatausahaan penerimaan, pengurusan restitusi, verifikasi pemindahbukuan dan rekonsiliasi Pajak Daerah;
h. pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap piutang Pajak Daerah dan pemberian pertimbangan terhadap pengajuan angsuran;
i. pelaksanaan kegiatan penerapan sanksi administrasi perpajakanPajak Daerah;
j. pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Daerah dengan melibatkan pihak lain;
k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan benda-benda berharga terkaitPajak Daerah;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan realisasi dan rekapitulasi penagihan Pajak Daerah;
m. pelaksanaan kegiatan penyelesaian kompensasi dan restitusi Pajak Daerah;
n. pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa Pajak Daerah;
o. pelaksanaan kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak

Daerah;

p. pelaksanaan kegiatan analisis terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
q. pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan penagihan Pajak Daerah;
r. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Pelaporan Pajak Daerah;
s. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Pelaporan Pajak Daerah;
t. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Penagihan Pajak Daerah;
u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Penagihan Pajak Daerah;
v. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. pelaksanaan kegiatan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah;
h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kepatuhan wajib pajak daerah melalui pengawasan dan pemeriksaan;
j. pelaksanaan kegiatan pembinaan, dan pengawasan terhadap retribusi daerah kepada perangkat daerah;
k. pelaksanaan kegiatan pertimbangan terhadap pengenaan sanksi penutupan dan pencabutan perizinan berusaha bagi wajib pajak Daerah I dan II yang tidak bersedia melaksanakan pembayaran dan pelaporan;
l. pelaksanaan kegiatan analisis dan pengembangan pajak daerahserta penyusunan kebijakan Pajak Daerah;

m. pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah;
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian pengembangan pajak daerah dan fasilitasi penyusunan pengembangan retribusi daerah pada perangkat daerah;
o. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan inovasi optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah antara lain melalui teknologi informasi;
p. pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian dan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah;
q. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
r. pelaksanaan kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
s. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi;
t. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan di Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
v. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di klasifikasikan berdasarkan status kepegawaian. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
sampai dengan Agustus Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Alih daya		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	9	1	1	3	2	4	20
2	D3	7	7	2	1		2	19
3	D4	3	-					3
4	S1	33	26	13	11	1	5	89
5	S2	5	9	2	2			16

Dari jumlah pegawai sebanyak 150 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025
(tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	13	6	19
2	Golongan III	42	37	79
3	Golongan IV	3	2	5
	Jumlah			103

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.036	1993	Jl.Abdurahman Saleh 522	Pakai	23/02/2007	62	Gudang dan Arsip	Pembelian	998.704.000	

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor	B	277	Jl Kanguru Raya I		Milik Pemda	Pembelian	172.343.000
2	Bangunan Gedung Kantor	B	380	Jl Pupowarno II No 10		Milik Pemda	Pembelian	48.772.000
3	Bangunan Gedung Kantor	B	126	Jl.Pemuda 148		Milik Pemda	Pembelian	90.607.680
4	Bangunan Gedung Kantor	B	208	Jl Pemuda 148		Milik Pemda	Pembelian	611.026.800
5	Bangunan Gedung Kantor	KB	200	Jl Abdulrahman Saleh		Milik Pemda	Pembelian	428.662.800

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

a. Capaian Kinerja Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelerasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Struktur APBD Kota Semarang terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang komponen memiliki struktur APBD terfokus pada Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah:

(1) Pajak Daerah
(2) Retribusi Daerah
(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
(4) Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Transfer Kota Semarang terdiri dari beberapa komponen diantaranya:

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari :
  (1.1) Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
  (1.1.1) Dana Transfer Umum, yang terdiri dari :
    (a) Dana Bagi Hasil
    (b) Dana Alokasi Umum
  (1.1.2) Dana Transfer Khusus
    (a) Dana Alokasi Khusus Fisik
    (b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik
  (1.2) Dana Insentif Daerah
(2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
  (2.1) Pendapatan Bagi Hasil
  (2.1.1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
  (2.2) Bantuan Keuangan
  (2.2.1) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi

Serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

(3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
(1) Hibah
(2) Dana Darurat

Pendapatan Daerah Kota Semarang mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Semarang terlihat di tabel 2.4.1 dan dari tabel terlihat rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Semarang selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024).

Rata-rata peningkatan pertumbuhan dari realisasi pendapatan daerah di Pemerintah Kota Semarang sebesar 5,63. Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya dengan tingkat pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,43.

Ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dibanding jenis komponen pendapatan lainnya. Rata-rata peningkatan pertumbuhan realisasi dari Pendapatan Transfer Kota Semarang sebesar 4,25. Dan rata-rata pertumbuhan realisasi dari Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar -29,94. Berikut kondisi pendapatan Kota Semarang dilihat dari tabel realisasi selama 5 tahun terakhir (2020-2024):

Tabel 2.4.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
02	**PENDAPATAN** **PENDAPATAN ASLI DAERAH**						
03	Pendapatan Pajak Daerah	1.425.695.913.644	1.445.171.299.551	1.956.226.658.076	2.132.818.531.293	2.196.946.311.555	12,19
04	Pendapatan Retribusi Daerah	88.681.866.360	96.448.844.019	101.044.938.813	128.708.007.029	539.634.310.123	90,04
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.339.018.950	66.895.891.301	66.717.372.156	73.271.009.532	83.624.549.830	12,28
06	Lain-lain PAD yang Sah	456.821.009.353	777.428.723.606	422.002.778.613	500.352.597.013	65.569.134.844	-10,97
07	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	**2.024.537.808.307**	**2.385.944.758.477**	**2.545.991.747.658**	**2.835.150.144.867**	**2.885.774.306.352**	**9,43**
08							
09	**PENDAPATAN TRANSFER**						
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**						
11	Dana Bagi Hasil Pajak	160.265.571.365	209.138.933.545	186.707.644.123	187.409.003.337	217.305.196.000	9,02
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.987.720.492	2.182.057.927	2.994.053.455	2.363.314.000	1.471.777.000	-2,95
13	Dana Alokasi Umum	1.183.614.821.000	1.167.622.970.000	1.153.121.976.661	1.208.211.990.718	1.277.400.412.000	1,98
14	Dana Alokasi Khusus	323.233.818.969	320.875.724.631	446.809.200.397	496.275.061.850	474.113.250.589	11,28
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**	**1.669.101.931.826**	**1.699.819.686.103**	**1.789.632.874.636**	**1.894.259.369.905**	**1.970.290.635.589**	**4,25**
16							
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**						
18	Dana Otonomi Khusus						
19	Dana Penyesuaian	114.971.389.000	64.614.342.000	54.251.362.000	14.615.779.000	30.953.583.000	-5,28
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)**	**114.971.389.000**	**64.614.342.000**	**54.251.362.000**	**14.615.779.000**	**30.953.583.000**	**-5,28**
21							
22	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**						
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	419.569.268.392	532.561.552.641	551.844.602.271	577.657.021.099	570.096.274.220	8,48
	Bantuan Keuangan			-			
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-			

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
25	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)**	**419.569.268.392**	**532.561.552.641**	**551.844.602.271**	**577.657.021.099**	**570.096.274.220**	**8,48**
	BANTUAN KEUANGAN						
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	26.781.465.445	23.539.789.384	27.421.089.496	31.188.960.908	10.734.642.320	-11,86
	Jumlah Bantuan Keuangan	**26.781.465.445**	**23.539.789.384**	**27.421.089.496**	**31.188.960.908**	**10.734.642.320**	**-11,86**
26	**Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)**	**2.230.424.054.663**	**2.320.535.370.128**	**2.423.149.928.403**	**2.517.721.130.912**	**2.582.075.135.129**	**3,73**
27							
28	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**						
29	Pendapatan Hibah	145.538.975.510	339.000.000	294.866.952	-	-	-53,20
30	Pendapatan Dana Darurat			-		-	0,00
31	Pendapatan Lainnya	-	116.068.153.132	-	-	-	0,00
32	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)**	**145.538.975.510**	**116.407.153.132**	**294.866.952**	**-**	**-**	**-29,94**
33	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)**	**4.400.500.838.480**	**4.822.887.281.737**	**4.969.436.543.013**	**5.352.871.275.779**	**5.467.849.441.481**	**5,63**

Grafik target dan realisasi pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah tersaji di gambar 2.2

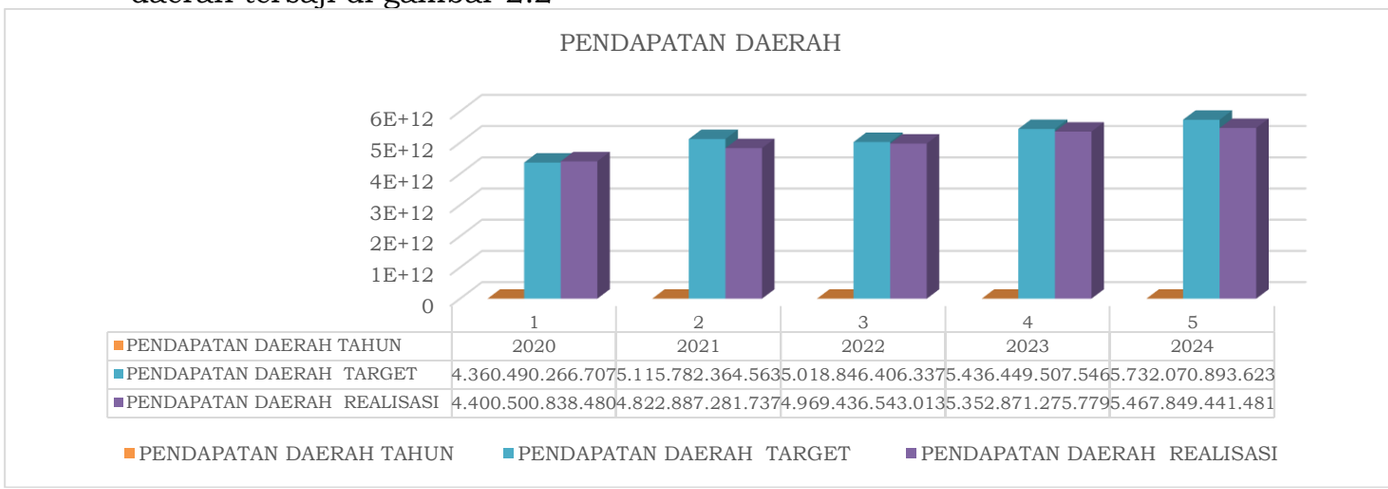

Gambar 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2020-2024

Tabel 2.4.2.
Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

REALISASI PENDAPATAN DAERAH			
TAHUN	**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)**	**REALISASI PENDAPATAN TRANSFER (Rp)**	**REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (Rp)**
2020	2.024.537.808.307	2.230.424.054.663	145.538.975.510
2021	2.385.944.758.477	2.320.535.370.128	116.407.153.132
2022	2.545.991.747.658	2.423.149.928.403	294.866.952
2023	2.835.150.144.867	2.517.721.130.912	-
2024	2.885.774.306.352	2.582.075.135.129	-
Jumlah	**12.677.398.765.661**	**12.073.905.619.235**	**262.240.995.594**
Rata-rata	**2.535.479.753.132**	**2.414.781.123.847**	**52.448.199.119**
	51	**48**	**1**

Rencana pembangunan di Kota Semarang tidak akan direalisasikan tanpa dukungan dari kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan struktur anggaran, pendapatan daerah yang berasal dari pos pendapatan asli daerah memiliki korelasi. Semakin besar proporsi pendapatan asli daerah sebagai penyumbang pendapatan daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut.

Hasil perhitungan kontribusi realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata kontribusi tertinggi dibandingkan Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Grafik kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah tersaji di gambar 2.3

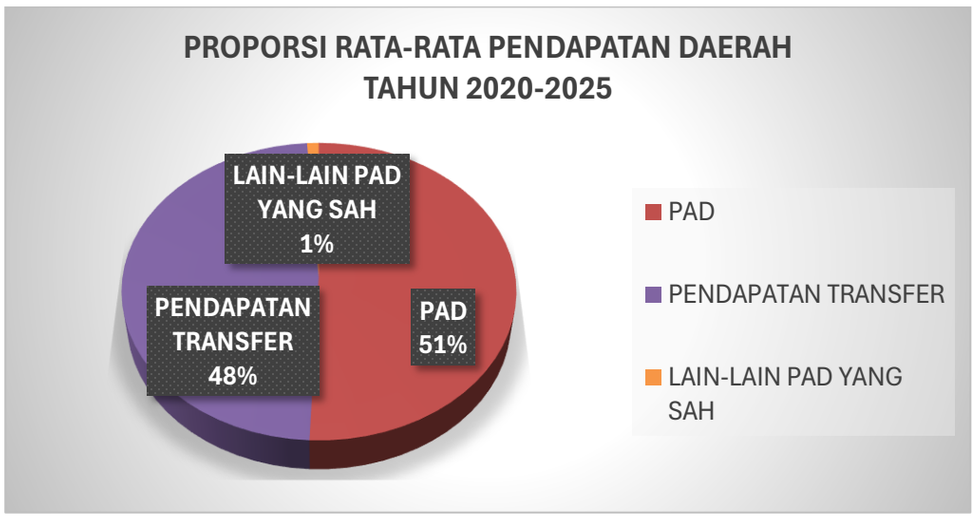

Gambar 2.3
Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatam terhadap Pendapatan Daerah

Jika melihat dari gambar 2.3, maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang baru menyumbang rata-rata sebesar 51 terhadap total pendapatan daerah Kota Semarang.

Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu berkontribusi sebesar 51. Pendapatan Transfer berkontribusi sebesar 48. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi hanya 1. Dengan Peandpatan Asli Daerah sebesar 51 menunjukkan bahwa lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari sumber lokal. Ini mengindikasikan kemandirian fiskal yang baik, karena daerah tidak terlalu bergantung pada dana dari pusat.

Untuk menjaga kemandirian fiskal daerah tetap tinggi atau bahkan meningkat diperlukan strategi berkelanjutan dalam menggali dan mengelola PendapatanAsli Daerah (PAD) secara efektif yaitu optimalisasi sumber pendapatan asli daerah yang ada, diversifikasi sumber pendapatan asli daerah yang baru, meningkatkan investasi daerah mellaui penawaran insentif pajak daerah untuk investor strategis dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan asli daearh.

Gambar A, B dan C menyajikan tentang kontribusi masing-masing komponen pendapatan asli daerah dirinci per sub komponen.

Tabel 2.4.3.
Kompisisi komponen pendapatan asli daerah

TAHUN	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
2020	1.425.695.913.644	88.681.866.360	53.339.018.950	456.821.009.353
2021	1.445.171.299.551	96.448.844.019	66.895.891.301	777.428.723.606
2022	1.956.226.658.076	101.044.938.813	66.717.372.156	422.002.778.613
2023	2.132.818.531.293	128.708.007.029	73.271.009.532	500.352.597.013
2024	2.196.946.311.555	539.634.310.123	83.624.549.830	65.569.134.844
Rata-rata	**1.831.371.742.824**	**190.903.593.269**	**68.769.568.354**	**444.434.848.686**
%	**72,2%**	**7,5%**	**2,7%**	**17,5%**

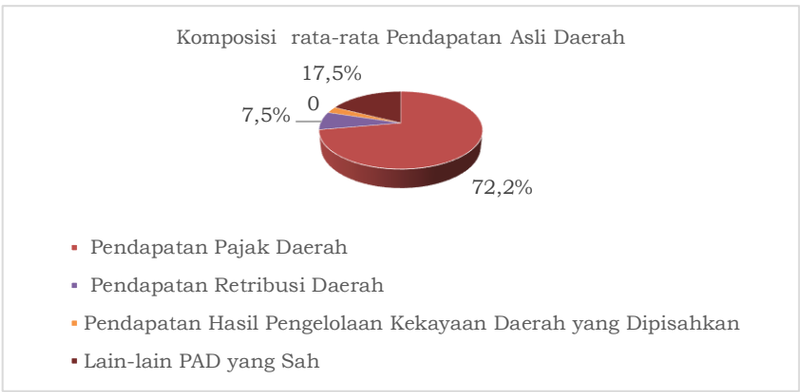

Gambar A
Komposisi rata-rata Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.4.4.
Komposisi rata-rata Pendapatan Transfer

TAHUN	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	BANTUAN KEUANGAN
2020	1.669.101.931.826	114.971.389.000	419.569.268.392	26.781.465.445
2021	1.699.819.686.103	64.614.342.000	532.561.552.641	23.539.789.384
2022	1.789.632.874.636	54.251.362.000	551.844.602.271	27.421.089.496
2023	1.894.259.369.905	14.615.779.000	577.657.021.099	31.188.960.908
2024	1.970.290.635.589	30.953.583.000	570.096.274.220	10.734.642.320
Rata-rata	**1.804.620.899.612**	**55.881.291.000**	**530.345.743.725**	**23.933.189.511**
%	**74,7%**	**2,3%**	**22,0%**	**1,0%**

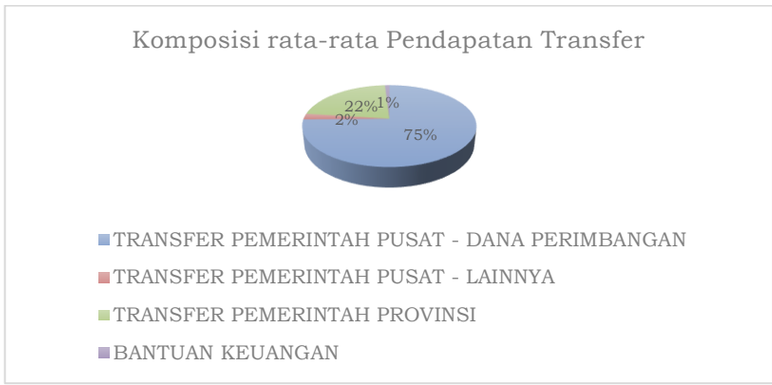

Gambar B
Kontribusi Pendapatan transfer

Tabel 2.4.5.
Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

TAHUN	Pendapatan Hibah	Pendapatan Dana Darurat	Pendapatan Lainnya
2020	145.538.975.510	-	-
2021	339.000.000	116.068.153.132	-
2022	294.866.952	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
Rata-rata	**29.234.568.492**	**23.213.630.626**	**-**
%	**55,7%**	**44,3%**	**0,0%**

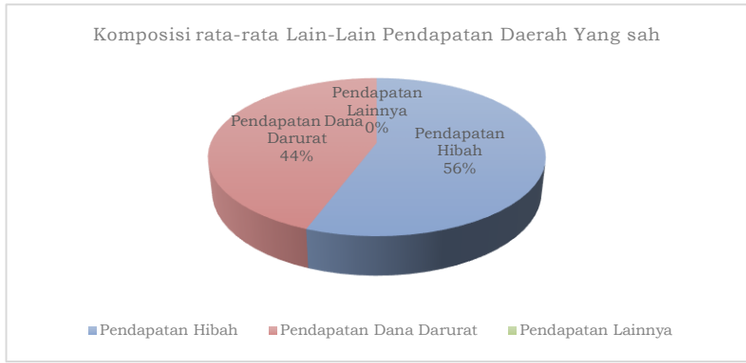

Gambar C
Komposisi Lain-Lain Pendapatan Yang sah

A. Untuk pendapatan asli daerah, kontribusi terbesar diberikan oleh pemasukan dari pajak daerah dengan rata-rata sebesar 72,2%, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi sebesar 17,5%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 7,5% dan Pendapatan Hasil Kekayaan Yang dipisahkan sebesar 2,7%.
B. Untuk Pendapatan Transfer kontribusi terbesar diberikan oleh komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar 74,7%
C. Untuk Lain-lain Pendapatan Dearah Yang Sah, kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Hibah sebesar 55%

Jika dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target pendapatan, realiasai anggaran realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Semarang telah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya dimana rata-rata realisasi mencapai 97,47%. Tahun 2020 adalah tahun capaian realisasi tertinggi sebesar 100,92%. Adapun realisasi pendapatan terendah adalah di tahun 2024 dimana realisasi pendapatan hanya sebesar 95,39%.

Berikut tabel target dan realisasi capaian pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2020-2024:

Tabel 2.4.6.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2020-2024

Tahun	Target Anggaran Pendapatan (APBD-P)	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Pendapatan	Kelebihan/ Kekurangan
2020	4.360.490.266.707	4.400.500.838.480	100,92%	40.010.571.773
2021	5.115.782.364.563	4.822.887.281.737	94,27%	(292.895.082.826)
2022	5.018.846.406.337	4.969.436.543.013	99,02%	(49.409.863.324)
2023	5.436.449.507.546	5.352.871.275.779	98,46%	(83.578.231.767)
2024	5.732.070.893.623	5.467.849.441.481	95,39%	(264.221.452.142)
Total	**25.663.639.438.776**	**25.013.545.380.490**	**97,47%**	**(650.094.058.286)**

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2020-2024

Selama periode Tahun anggaran 2020-2024, realisasi pendapatan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Tahun 2020 dengan target Rp 4.360.490.266.707 mampu memperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 4.400.500.838.480 (100,92%) dengan rincian:

- Pajak Daerah dengan target Rp 1.415.187.888.000 terealisasi Rp 1.425.695.913.644 (100,74%)
- Retribusi daerah dengan target Rp 121.424.495.000 terealisasi Rp 88.681.866.360 (110,05%)
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan target Rp 53.323.886.000 terealisasi Rp 53.339.018.950 (100,03%)
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan target Rp 340.501.840.000 terealisasi Rp 456.821.009.353 (134,16%)
- Pendapatan Transfer dengan target Rp 2.298.718.444.667 hanya terealisasi Rp 2.230.424.054.663 (97,03%)
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan Rp 172.173.009.040 hanya terealisasi Rp 145.538.975.510 (84,53%)

Tahun 2021 dengan target Rp 5.115.782.364.563 mampu memperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 4.822.887.281.737 (94,27%) dengan rincian:

- Pajak Daerah dengan target Rp 2.016.634.447.354 terealisasi Rp 1.445.171.299.551 (71,66%)
- Retribusi daerah dengan target Rp 87.617.710.256 terealisasi Rp 96.448.844.019 (110,08%)
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan target Rp 66.895.891.301 terealisasi Rp 66.895.891.301 (100,00%)
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan target Rp 436.545.036.770 terealisasi Rp 777.428.723.606 (178,09%)
- Pendapatan Transfer dengan target Rp 2.385.062.664.824 hanya terealisasi Rp 2.320.535.370.128 (97,29%)
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan Rp 123.026.614.057 hanya terealisasi Rp 116.407.153.132 (94,62%)

Tahun 2022 dengan target Rp 5.018.846.406.337 mampu memperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 4.969.436.543.013 (99,02%) dengan rincian:

- Pajak Daerah dengan target Rp 1.937.950.180.074 terealisasi Rp 1.956.226.658.076 (100,94%)
- Retribusi daerah dengan target Rp 110.704.628.900 terealisasi Rp 101.044.938.813 (91,27%)
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan target Rp 66.717.312.156 terealisasi Rp 66.717.312.156 (100,00%)
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan target Rp 418.271.336.672 terealisasi Rp 422.002.778.613 (100,89%)
- Pendapatan Transfer dengan target Rp 2.485.202.948.535 hanya terealisasi Rp 2.423.149.928.403 (97,50%)
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan Rp 0 terealisasi Rp 294.866.952 (100,00%)

Tahun 2023 dengan target Rp 5.436.449.507.546 mampu memperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 5.352.871.275.779 (98,46%) dengan rincian:

- Pajak Daerah dengan target Rp 2.200.262.872.393 terealisasi Rp 2.132.818.531.293 (96,93%)
- Retribusi daerah dengan target Rp 152.519.479.211 terealisasi Rp 127.708.007.029 (84,39%)
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan target Rp 76.956.408.922 terealisasi Rp 73.271.009.532 (95,21%)
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan target Rp 454.477.588.550 terealisasi Rp 500.352.597.013 (110,09%)
- Pendapatan Transfer dengan target Rp 2.552.233.158.470 hanya terealisasi Rp 2.517.130.912 (98,65%)
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan Rp 0 terealisasi Rp 0 (0,00%)

Tahun 2024 dengan target Rp 5.732.070.893.623 mampu memperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 5.467.849.441.481 (95,39%) dengan rincian:

- Pajak Daerah dengan target Rp 2.389.028.620.494 terealisasi Rp 2.196.946.311.5553 (91,96%)
- Retribusi daerah dengan target Rp 666.899.665.632 terealisasi Rp 539.634.310.123 (80,92%)
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan target Rp 79.688.418.778 terealisasi Rp 83.624.549.830 (104,94%)
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan target Rp 27.697.819.501 terealisasi Rp 65.569.134.844 (236,73%)
- Pendapatan Transfer dengan target Rp 2.568.756.369.218 hanya terealisasi Rp 2.582.075.135.129 (100,52%)
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan Rp 0 terealisasi Rp 0 (0,00%)

Jika dirinci per masing-masing komponen, maka target dan realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Selama periode Tahun Anggaran 2020-2024, total target anggaran PAD sebanyak Rp 13.078.466.229.965,- Dengan realisasinya sebesar Rp 12.677.398.765.661,- atau sebanyak 96,93%.

Realisasi anggaran PAD tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan angka realisasi 107,14%. Kondisi target dan realisasi PAD tahun 2020-2024

terjelaskan di tabel 2.4.7. Realisasi anggaran PAD terkecil terjadi pada tahun 2024 dengan angka realisasi 91,23%. Hal ini disebabkan target pendapatan retribusi Rp 666.899.665.632 hanya terealisasi Rp 539.634.310.123 (80,92%) dan target pajak daerah sebesar Rp 2.389.028,620.494 hanya terealisasi Rp 2.196.946.311.555 (91,96%).

Tabel 2.4.7.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
Tahun 2020-2024

Tahun	Target Anggaran PAD (APBD-P)	Realisasi PAD	% Realisasi PAD	Kelebihan/ Kekurangan
2020	1.889.598.813.000	2.024.537.808.307	107,14%	134.938.995.307
2021	2.607.693.085.682	2.385.944.758.477	91,50%	(221.748.327.205)
2022	2.533.643.457.802	2.545.991.747.658	100,49%	12.348.289.856
2023	2.884.216.349.076	2.835.150.144.867	98,30%	(49.066.204.209)
2024	3.163.314.524.405	2.885.774.306.352	91,23%	(277.540.218.053)
Total	**13.078.466.229.965**	**12.677.398.765.661**	**96,93%**	**(401.067.464.304)**

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2020-2024

Jika dibandingkan dengan kondisi Pendapatan Daerah, PAD memiliki fluktuasi yang sama dengan Pendapatan daerah. Pajak daerah selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 9,43%.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah di Kota Semarang memiliki beberapa jenis. Adapun jenis Pajak Daerah yang dipungut Badan Pendapatan Daerah meliputi (7) sebelas mata pajak meliputi :

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) :
   a. Jasa Perhotelan
   b. Jasa Makanan/Minuman
   c. Jasa Kesenian dan Hiburan
   d. Jasa Parkir
   e. Jasa Tenaga Listrik
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
3. Pajak Parkir
4. Pajak Air Tanah
5. Pajak Sarang Burung Walet
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pajak Bumi dan Bangunan

Jika dilihat dari kondisinya, Pertumbuhan Pajak Daerah cenderung lebih tinggi dengan pertumbuhan PAD secara total. Pajak daerah dipengaruhi oleh gejolak perekonomian dimana melemahnya aktivitas perekonomian akan berpengaruh signifikan pada kondisi pajak daerah.

Tabel 2.4.8.
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	Target Anggaran Pajak Daerah (APBD-P)	Realisasi Pajak Daerah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2016	1.415.187.888.000	1.425.695.913.644	100,74%	10.508.025.644
2017	2.016.634.447.354	1.445.171.299.551	71,66%	(571.463.147.803)
2018	1.937.950.180.074	1.956.226.658.076	100,94%	18.276.478.002
2019	2.200.262.872.393	2.132.818.531.293	96,93%	(67.444.341.100)
2020	2.389.028.620.494	2.196.946.311.555	91,96%	(192.082.308.939)
Total	1.415.187.888.000	1.425.695.913.644	100,74%	10.508.025.644

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2020-2024

Target dan realisasi Pajak Daerah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, secara rinci sebagaimana tabel 2.4.9

Tabel 2.4.9.
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	TARGET 2021	REALISASI 2021	%	TARGET 2022	REALISASI 2022	%	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
	A. PAJAK DAERAH	**1.415.187.888.000**	**1.425.695.913.644**	**100,74%**	**2.016.634.447.354**	**1.445.171.299.551**	**71,66%**	**1.937.950.180.076**	**1.956.226.658.076**	**100,94%**	**2.200.262.872.393**	**2.132.818.531.293**	**96,93%**	**2.389.028.620.494**	**2.196.946.321.564**	**91,96%**
1	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**471.612.027.082**	**437.903.720.325**	**92,85%**	**790.784.403.000**	**446.772.388.586**	**56,50%**	**699.221.760.087**	**627.868.080.385**	**89,80%**	**772.671.708.059**	**745.511.697.957**	**96,48%**	**771.000.000.000**	**816.815.432.777**	**105,94%**
	Jasa Perhotelan	91.583.042.082	61.575.723.267	67,23%	174.000.000.000	69.954.889.289	40,20%	130.301.123.566	133.853.023.940	102,73%	170.000.000.000	175.288.227.655	103,11%	175.000.000.000	175.181.319.288	100,10%
	Jasa Makanan /Minuman	116.562.808.000	117.319.039.070	100,65%	249.070.166.000	129.367.077.520	51,94%	195.100.000.000	198.615.266.080	101,80%	228.637.953.791	238.209.395.420	104,19%	240.000.000.000	256.050.771.800	106,69%
	Jasa Kesenian dan Hiburan	18.616.229.000	11.902.333.920	63,94%	66.800.000.000	8.379.554.932	12,54%	29.800.000.000	25.678.594.750	86,17%	33.230.069.176	33.569.592.349	101,02%	34.000.000.000	33.377.427.335	98,17%
	Jasa Parkir	16.059.474.082	13.724.209.186	85,46%	51.414.237.000	11.786.312.589	22,92%	24.500.000.000	20.065.566.714	81,90%	23.884.561.229	25.646.201.276	107,38%	12.000.000.000	12.163.643.023	101,36%
	Jasa Tenaga Listrik	228.790.473.918	233.382.414.882	102,01%	249.500.000.000	227.284.554.256	91,10%	319.520.636.521	249.655.628.901	78,13%	316.919.123.863	272.798.281.257	86,08%	310.000.000.000	340.042.271.331	109,69%
2	**Pajak Mineral Bukan Logam**	**706.449.000**	**272.204.700**	**38,53%**	**29.223.600**	**32.259.600**	**110,39%**	**2.061.500.000**	**81.211.830**	**3,94%**	**16.466.000**	**86.859.000**	**527,51%**	**90.000.000**	**245.236.800**	**272,49%**
3	**Pajak Reklame**	**21.754.600.000**	**23.845.918.640**	**109,61%**	**44.000.000.000**	**26.332.031.520**	**59,85%**	**35.700.000.000**	**34.909.966.403**	**97,79%**	**80.804.766.143**	**35.013.107.940**	**43,33%**	**54.560.000.000**	**33.525.539.692**	**61,45%**
4	**Pajak Air Tanah**	**18.923.428.000**	**19.288.938.013**	**101,93%**	**20.220.320.754**	**17.837.303.034**	**88,21%**	**27.893.500.000**	**22.791.631.767**	**81,71%**	**20.823.667.914**	**22.609.911.448**	**108,58%**	**26.810.000.000**	**20.720.803.982**	**77,29%**
5	**Pajak Sarang Burung Walet**	**5.000.000**	**500.000**	**10,00%**	**500.000**	**500.000**	**100,00%**	**61.875.000**	**500.000**	**0,81%**	**644.578**	**850.000**	**131,87%**	**620.494**	**700.000**	**112,81%**
6	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**374.686.383.918**	**465.416.313.975**	**124,21%**	**711.600.000.000**	**477.946.170.903**	**67,17%**	**622.511.544.989**	**702.223.912.075**	**112,80%**	**706.601.278.256**	**696.290.978.052**	**98,54%**	**834.215.000.000**	**695.581.576.009**	**83,38%**
7	**Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (P2)**	**527.500.000.000**	**478.968.317.991**	**90,80%**	**450.000.000.000**	**476.250.645.908**	**105,83%**	**550.500.000.000**	**568.351.355.616**	**103,24%**	**619.344.341.443**	**633.305.126.896**	**102,25%**	**702.353.000.000**	**627.818.307.804**	**89,39%**
8	**OPSEN PKB**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**2.238.724.500**	**100,00%**
9	**OPSEN BBNKB**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**

Sumber: Bapenda Kota Semarang, 2020-2024

Komponen lain dari Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2022-2024 retribusi daerah mengalami kenaikan pertumbuhan rata-rata 90,04%. Hal ini disebabkan adanya perubahan posisi struktur pendapatan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Dearah dimana terdapat beberapa jenis retribusi yang semula dikategorikan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah beralih menjadi retribusi BLUD dan Non BLUD. Kondisi realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 realisasinya mencapai 86,91% per tahun. Realisasi terendah di tahun 2024 yang hanya sebesar 80,92% dan yang tertinggi di tahun 2021 dengan realisasi sebesar 110,08%.

Pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung tidak sejalan dengan pola pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern mencakup komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan aturan pemungutan Retribusi Daerah dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar Retribusi Daerah.

Tabel 2.4.10.
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	Target Anggaran Retribusi Daerah (APBD-P)	Realisasi Retribusi Daerah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2020	80.585.199.000,00	88.681.866.360,00	110,05%	8.096.667.360
2021	87.617.710.256,00	96.448.844.019,00	110,08%	8.831.133.763
2022	110.704.628.900,00	101.044.938.813,00	91,27%	(9.659.690.087)
2023	152.519.479.211,00	128.708.007.029,00	84,39%	(23.811.472.182)
2024	666.899.665.632,00	539.634.310.123,00	80,92%	(127.265.355.509)
Total	**1.098.326.682.999**	**954.517.966.344**	**86,91%**	**(143.808.716.655)**

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2020-2024

Komponen lain dari Pendapatan Asli Daerah adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan rata-rata 12,28%. Kondisi realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 realisasinya mencapai 100,08 % per tahun. Realisasi terendah di tahun 2023 yang hanya sebesar 95,21% dan yang tertinggi di tahun 2024 dengan realisasi sebesar 104,94 %.

Jika dilihat dari kondisinya, realisasi Pendapatan Asli Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berjalan kurang seimbang. Ini dikarenakan laba yang diperoleh BUMD belum sejalan dengan perusahaan pada umumnya.

Tabel 2.4.11.
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kota Semarang Tahun 2016-2020

Tahun	Target Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (APBD-P)	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2020	53.323.886.000,00	53.339.018.950,00	100,03%	15.132.950
2021	66.895.891.301,00	66.895.891.301,00	100,00%	-
2022	66.717.312.156,00	66.717.372.156,00	100,00%	60.000
2023	76.956.408.922,00	73.271.009.532,00	95,21%	(3.685.399.390)
2024	79.688.418.778,00	83.624.549.830,00	104,94%	3.936.131.052
Total	**343.581.917.157**	**343.847.841.769**	**100,08%**	**265.924.612**

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2020-2024

Komponen lain dari Pendapatan Asli Daerah adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipisahkan mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata -10,97%. Hal ini disebabkan adanya perubahan posisi struktur pendapatan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dimana terdapat beberapa jenis retribusi yang semula dikategorikan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah beralih menjadi retribusi BLUD. Kondisi realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 realisasinya mencapai 132,47 % per tahun.

Realisasi terendah di tahun 2022 yang hanya sebesar 100,89 % dan yang tertinggi di tahun 2020 dengan realisasi sebesar 134,16 %.

Tabel 2.4.12.
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Semarang
Tahun 2020-2024

Tahun	Target Anggaran Lain-lain PAD yang sah (APBD-P)	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2020	340.501.840.000,00	456.821.009.353,00	134,16%	116.319.169.353
2021	436.545.036.771,00	777.428.723.606,00	178,09%	340.883.686.835
2022	418.271.336.672,00	422.002.778.613,00	100,89%	3.731.441.941
2023	454.477.588.550,00	500.352.597.013,00	110,09%	45.875.008.463
2024	27.697.819.501,00	65.569.134.844,00	236,73%	37.871.315.343
	1.677.493.621.494	**2.222.174.243.429**	**132,47%**	**544.680.621.935**

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2020-2024

B. **Pendapatan Transfer dan Lain-Lain PAD yang Sah**

Selama periode Tahun Anggaran 2020-2024, terdapat peralihan pendelagasian sesuai dengan Peraturan Wali Kota Semarang mengenai SOTK Bapenda Kota Semarang bahwa Pendapatan Transfer dan Lain-lain PAD Yang Sah diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Untuk itu, penjelasan target dan realisasi nya diserahkan kepada perangkat daerah Terkait

b. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan keuangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Indikator Tujuan dan Sasaran**																		
	Tujuan : Persentase Pendapatan Asli Daerah	%			44,65	54,57	54,57	54,57	54,57	46,01	49,47	51,23	52,96	52,78	103,05	90,65	93,88	97,05	96,72
	Sasaran I : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%			N/A	10	10	10	10	N/A	17,85	6,71	11,36	1,79	0	178,50	67,10	113,60	17,90
	Sasaran II : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%			N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100,49	98,30	91,23	0	0	100,49	98,30	91,23
	Program : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%			N/A	10	10	10	10	N/A	17,85	6,71	11,36	1,79	0	178,50	67,10	113,60	17,90
2	**Indikator kinerja kunci**																		
	Tujuan : Persentase Pendapatan Asli Daerah	%			44,65	54,57	54,57	54,57	54,57	46,01	49,47	51,23	52,96	52,78	103,05	90,65	93,88	97,05	96,72
3	**Indikator SPM**	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	..																		
4	**Indikator TPB (No 17)**				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan																		
	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%		Naik	Naik	Naik	Naik	N/A	N/A	1,40	1,65	1,66	N/A	N/A	N/A	Tercapai	Tercapai	N/A	N/A
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%		12	12	12	12	N/A	N/A	1,04	1	1,28	N/A	N/A	N/A	Belum Tercapai	Belum Tercapai	N/A	N/A
	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak	%		Naik	Naik	Naik	Naik	N/A	N/A	35	30,34	40,16	N/A	N/A	N/A	Belum Tercapai	Tercapai	N/A	N/A

Sumber : Bapenda Tahun 2020-2024

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
		13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
3	Satuan kinerja	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun
10	Target tahun kelima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100$

PERHITUNGAN REALISASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2020-2024

REALISASI INDIKATOR TUJUAN

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
PAD / PENDAPATAN DAERAH x 100%	2.024.537.808.307,00 / 4.400.500.838.480,00	2.385.944.758.477,00 / 4.822.887.281.737,00	2.545.991.747.658,00 / 4.969.436.543.013,00	2.835.150.144.867,00 / 5.352.871.275.779,00	2.885.774.306.352,00 / 5.467.849.441.481,00
Hasil	**46,01%**	**49,47%**	**51,23%**	**52,96%**	**52,78%**

REALISASI INDIKATOR SASARAN I

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(Realisasi PAD Tahun (n) - (Realisasi PAD Tahun (n-1) (Realisasi PAD Tahun (n-1)	N/A	361.406.950.170 2.024.537.808.307	N/A	N/A	N/A
Hasil	**N/A**	**17,85%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

REALISASI INDIKATOR SASARAN II

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi PAD x 100% Target PAD	N/A	N/A	1.956.226.658.076,00 1.937.950.180.074,00	2.132.818.531.293,00 2.200.262.872.393,00	2.196.946.311.555,00 2.389.028.620.494,00
Hasil	**N/A**	**N/A**	**100,94%**	**96,93%**	**91,96%**

REALISASI INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(Realisasi PAD Tahun (n) - (Realisasi PAD Tahun (n-1) x 100% (Realisasi PAD Tahun (n-1)	N/A	361.406.950.170 2.024.537.808.307	160.046.989.181 2.385.944.758.477	289.158.397.209 2.545.991.747.658	50.624.161.485 2.835.150.144.867
Hasil	**N/A**	**17,85%**	**6,71%**	**11,36%**	**1,79%**

Evaluasi indikator kinerja daerah untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian pada Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan capaian 97,05 persen di mana realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 97,05 Penurunan capaian terjadi pada tahun 2024 dengan Capaian pada Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan capaian 96,72 persen. Meskipun demikian hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang mandiri.

Jumlah indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Kota Semarang sebanyak 224 indikator kemudian dilakukan penapisan sesuai dengan konteks Kota Semarang. Sehingga didapatkan indikator yang relevan dan sesuai konteks sebanyak 196 indikator. Adapun beberapa penapisan yang dilakukan sehingga dari 224 indikator menjadi 196 indikator dengan menggunakan metadata satu. Beberapa kriteria penapisan dalam pencapaian TPB di Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Indikator yang tidak menjadi kewenangan Kota Semarang atau indikator tersebut merupakan kewenangan pusat atau provinsi, akan dikeluarkan dari analisis.
- Indikator yang tidak ada datanya atau NA pada tahun eksisting, dan indikator tersebut juga tidak terdapat dalam metadata dua, dikeluarkan dari analisis.

Rincian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Semarang per indikator disandingkan dengan Target sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan pemangku kepentingan serta pilar dan indikator tujuan, Bapenda Kota Semarang termasuk Organisasi Pemerintah yang termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Ekonomi Nomor 17 yaitu Kemitraan Mencapai Tujuan dengan hasil :

1. Pada Tahun 2022 capaian indikator SDG's Kota Semarang Nomor 17.1.1* tentang total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya sebesar 1,66 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2021 sebesar 1,65. Dengan peningkatan ini menunjukkan Pemerintah Kota Semarang mampu membiayai pengeluarannya dari pendapatannya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada pendapatan dari pemerintah pusat.
2. Pada Tahun 2022 capaian indikator SDG's Kota Semarang Nomor 17.1.1.(a) tentang Rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 1,28 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2021 sebesar 1 . Dengan peningkatan ini menunjukkan semakin optimalnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa Sasaran TPB yang digunakan yaitu *Meningkatnya rasio pendapatan negara menjadi Ll,4 -12,O persen PDB Adalah 12* maka Pemerintah Kota Semarang belum mencapai indicator SDG's tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang harus berperan aktif dalam menggali potensi dari penerimaan pajak yang belum optimal
3. Pada Tahun 2022 capaian indikator SDG's Kota Semarang Nomor 17.1.2* tentang Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak sebesar 40,16 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2021 sebesar 30,34. Dengan peningkatan ini menunjukkan peran pajak sangat besar

dalam membiayai belanja pemerintah domestik. Semakin tinggi proporsi pajak maka semakin mandiri dan berkelanjutan sistem fiskal pemerintah daerah

c. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Berikut merupakan tabel evaluasi program Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang bertujuan untuk menilai kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dicapai dari tahun 2020 hingga akhir periode 2024. Tabel ini memuat informasi detail terkait realisasi anggaran dalam satuan rupiah, disertai persentase capaian kinerja dari setiap indikator sebagai tolok ukur keberhasilan. Setiap indikator juga dilengkapi dengan predikat tertentu, yang menggambarkan tingkat pencapaian program secara lebih objektif. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis dalam merumuskan langkah perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang gunameningkatkan efektivitas dan kualitas pendapatan di Kota Semarang.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.187.197.058					5.686.197.077					92						
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.896.163.690					1.555.661.489					82						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	250.361.000					216.421.000					86						
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.832.186.252					6.586.479.777					96						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		73.118.412.859	62.788.660.80	67.505.529.256	70.409.789.291		62.605.629.237	58.376.962.338	61.658.013.987	60.958.347.958		86	93	91	87	-0,77	-0,76
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		12.614.799.387	25.960.070.21	26.237.723.789	26.113.382.795		10.675.561.822	23.191.647.746	24.364.804.165	24.658.391.047		85				35,46	41,17
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		50.939.825	36.947.750				19.985.000	36.947.750				39				-9,16	28,29

Sumber : Bapenda 2020-2024

Keterangan:

1	Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
3	Anggaran tahun kedua renstra disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
4	Anggaran tahun ketiga renstra disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
5	Anggaran tahun keempat renstra disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
6	Anggaran tahun elima renstra disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keternagan 2-6
7	Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keternagan 7 -11
8	Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun		
9	Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun		
11	Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

d. Mitra Pemerintah Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemeberian pelayanan pajak daerah berperan sebagau mitra strategis, memberikan masukan dan dukungan dalam reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan daerah. Berikut mitra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang dalam pemberian pelayanan pajak daerah :

a. Perbankan (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Jateng)
b. E-commerce
b. Gojek
c. Market retail (Indomaret dan Alfamart)
d. Kantor Pos
e. Kejaksaan Negeri Semarang
f. Kantor Pertanahan Kota Semarang
g. DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)
h. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
j. Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah
k. Organisasi Perangkat Daerah Penghasil Retribusi
l. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
m. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)
n. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO)
o. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)
p. Perkumpulan Karaoke dan Hiburan Malam (PERKAHIMA)
q. Real Estate Indonesia (REI)
r. Himpunan Pengusaha Air Minum (HIPAM)
s. PT Perusahaan Opsional Surat (POS) Indonesia

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja PD

Dukungan BUMD yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah dalam pecapaian tugas fungsi Perangkat Daerah yaitu :

a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank BPD Jateng) sebagai unsur BUMD yang melakukan pembukaan rekening penambungan pembayaran pajak daerah dalam bentuk Giro bersaldo nihil, membuat Laporan Penerimaan Harian PBB dan mengirimkannya ke Bapenda Kota Semarang, melimpahkan hasil penerimaan pembayaran PBB, melakukan transaksi pemindahbukuan penerimaan pembayaran pajak daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang serta memberikan fasilitas Internet Banking untuk memonitor transaksi pembayaran PBB oleh Wajib Pajak serta menyampaikan Tanda Bukti Penyetoran hasil pemindahbukuan dari rekening penampungan ke Rekening Umum Kas Daerah Kota Semarang
b. PT. Perusahan Listrik Negara (PLN) Kota Semarang sebagai unsur BUMN yang menyepakati pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik dan pembayaran rekening Listrik serta penyelenggaraan penerangan jalan umum Pemerintah Kota Semarang.

f. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

a. Kejaksaan Negeri Semarang dalam hal melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum , Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Peningkatan Kompetensi sumber daya

manusia dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus untuk pendampingan konfirmasi putang pajak daerah

b. Badan Pertanahan Nasional dalam hal pengintegrasian data pertanahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat guna mewujudkan tata Kelola administrasi pemerintahan yang baik
c. Perbankan (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Jateng) dalam hal peningkatan layanan kepada Wajib Pajak dan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah melalui Ssitem Layanan Penerimaan Pembayaran dan Pelaporan Hasil Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah *Online secara Host to Host* di Kota Semarang
d. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam hal meningkatkan, mengkoordinasikan, dan menyinergikan antara Pemerintah kota Semarang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka Pengelolaan pajak dan opsen pajak yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah di Pemerintah kota Semarang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
e. Seluruh Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Semarang sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak daerah.

g. Inovasi Perangkat Daerah

Pada bagian ini di jelaskan Inovasi yang sudah dikembangkan atau diterapkan oleh Perangkat Daerah dalam periode lalu.

NO	JENIS SISTEM	FUNGSI
1	SIMPAD	Sistem Informasi Pajak Daerah digunakan untuk : - Membuat Ketetapan Offocial Assessment (Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, SKPDKB) - Pembayaran Self Assesment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet - Membuat laporan monitoring pendapatan dan kendali wajib pajak
2	SIMBPHTB	Sistem Informasi BPHTB digunakan untuk : - Menerima setoran BPHTB - Membuat verifikasi BPHTB
3	SIMPBB	Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk : - Membuat Ketetapan PBB beserta cetak masalnya - Membuat dan mengelola pelayanan PBB (perubahan, keberatan, salinan dst) - Untuk pembayaran dari Wajib Pajak PBB
4	E-Tax Restoran dan Hiburan	E-Tax Restoran dan Hiburan digunakan untuk : - Memonitoring besaran penerimaan dari wajib pajak restoran dan hiburan secara realtime
5	E-Tax Parkir	E-Tax Parkir digunakan untuk : - Memonitoring besaran penerimaan dari wajib pajak parkir secara realtime
6	Monitoring Pajak Realtime	Monitoring Pajak Realtime digunakan untuk: - Melihat jumlah penerimaan pajak daerah secara realtime
7	LEK-PAIJO	LEK-PAIJO (Layanan Elektronik Pajak DaerahSistem Jaringan Online) digunakan untuk : - Menampilkan informasi tentang Ketetapan Pajak Daerah - Mencetak SSPD PBB, SKL PBB, SKPD Reklame dan SKPD air Tanah
8	E-PELAYANAN	E-PELAYANAN digunakan untuk : - Monitoing berkas pelayanan PBB - Updating data LSPOP
9	E-DHKP PBB	E-DHKP PBB digunakan untuk :

NO	JENIS SISTEM	FUNGSI
		- Bentuk Digital dari DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan PBB) untuk mempermudah dalam pencairan data
10	SI KEPO	SI KEPO (Sistem Informasi Ketetapan Pajak Daerah On Line) digunakan untuk : - Untuk membantu petugas Kelurahan dalam melakukan pencarian ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame)
11	Apilkasi Mobile Pakde Semar	Aplikasi Mobile PAKDE SEMAR (Pajak Daerah Semarang) digunakan untuk : - Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses urusan perpajakan daerah tanpa harus tatap muka dengan petugas pajak.
12	E-SUMPAH	E-SUMPAH (Sistem Unggah Mandiri Pajak Daerah) digunakan untuk : - Pengajuan, Permohonan, Pelayanan PBB, semua syarat berkas permohonan di upload mandiri oleh Wajib Pajak
13	SI PELAPOR	SI PELAPOR (Sistem Pembukuan dan Pelaporan) digunakan untuk : - Rekonsiliasi dengan Bank Jateng, Mandiri, BNI, BTN

Sumber : Bapenda Kota Semarang

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak
b. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah
c. Trend pelayanan urusan pemerintahan yang bergeser ke arah layanan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi
d. Belum optimalnya OPD penghasil dalam menggali potensi retribusi daerah
e. Kebutuhan Data Wajib Pajak yang akurat dan terintegrasi dengan data Nomor Induk Kependudukan

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

a. Komitmen yang kuat dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak maupun retribusi
b. Pemanfaatan Teknologi informasi yang memudahkan kerja badan (contoh: aplikasi perpajakan)
c. Perkembangan investasi di kota Semarang yang terus meningkat sebagai kota jasa;
d. Adanya potensi pajak dan retribusi imbas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
e. Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan pelayanan dan pengembangan sistem pengelolaan PAD secara efektif dan efisien

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu: “belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah daerah” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
“belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pendataan dan pendaftaran pajak daerah	1. Belum terupdatenya subjek dan objek pajak daerah I dan pajak daerah II 2. Peningkatan optimalisasi atas potensi pajak yang belum tergali dari sektor pajak daerah I dan pajak daerah II
2	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dan ketepatan penetapan pajak berbasis data yang terintegrasi	1. Belum optimalnya WP yang memanfaatkan layanan pajak berbasis website 2. Belum optimalnya ketetapan pajak daerah yang tepat
3	Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah I dan pajak daerah II 2. Belum optimalmnya penagihan pajak daerah I dan pajak daerah II
4	Belum optimalnya penggalian sumber pendapatan asli daerah	1. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah penghasil dalam menggali potensi retribusi dan PAD lainnya 2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan wajib pajak
5	Belum efektifnya tata kelola kelembagaan Bapenda.	Perlunya Upaya optimalisasi tertib keuangan
		Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu
		Perlunya peningkatan penyediaan sarana prasarana penunjang kinerja Bapenda

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan di Kota Semarang, dapat dikemukakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, yaitu **belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang berdampak pada tingkat kemandirian pembangunan daerah**. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan akses terhadap data wajib pajak yang akurat, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, masih terdapat potensi pajak dari sektor-sektor ekonomi yang belum teridentifikasi atau terjangkau oleh pemerintah daerah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui beberapa upaya, seperti meningkatkan digitalisasi sistem pajak daerah melalui aplikasi atau portal online guna mempermudah wajib pajak, memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak, serta mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap objek pajak dengan dukungan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan potensi pajak di seluruh wilayah kota.

Permasalahan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.4

Kerangka Logis Permasalahan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"**Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**"

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan rasio gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi tersebut selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Toleran dan Berbudaya dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian.
2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat yang Berfokus pada Kebutuhan Individu dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi.
3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, dan Papan yang Merupakan Elemen Kunci agar Tercapai Taraf Hidup yang Layak.
4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ke Level Global
5. Mewujudkan Infrastruktur Kota yang Saling Terhubung dengan Peningkatan Aksesibilitas, dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan.
6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, serta Dampaknya Bagi Masyarakat.
7. Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Tujuan dari setiap pokok visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif dirumuskan tujuan sebagai berikut :
   a. Meningkatkan perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing
   b. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, dan menunjang produktivitas bagi seluruh masyarakat
   c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian
   d. Meningkatkan lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif
2. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial, Sejahtera, dan Inklusif dirumuskan tujuan Menurunkan kemiskinan secara inklusif
3. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Lestarim Berkelanjutan dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatkan kualitas sumbe daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat
4. Pada pokok visi Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif dirumuskan tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat.

Hasil rumusan Sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut :
   - Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, melalui indikator LPE Sektor Perdagangan dan Jasa dan Persentase peningkatan kunjungan wisata.
   - Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, melalui PMTB terhadap PDRB.
   - Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa, melalui indikator tingkat inflasi
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, dan menunjang produktivitas bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut :
   - Meningkatkan konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan, melalui indikator tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah.
   - Meningkatkan pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis, melalui indikator tingkat pengembangan kawasan strategis.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian
   - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan, diukur melalui Indeks Kesehatan.
   - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul tangguh dan produktif secara merata, diukur melalui Indeks Pendidikan
   - Meningkatnya kesetaraan gender, melalui Indeks Pembangunan Gender

4. Meningkatkan lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif
    - Meningkatnya kualitas demokrasi politik, melalui indikator indeks demokrasi.
    - Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan, melalui angka kriminalitas
5. Menurunkan kemiskinan secara inklusif
    - Menurunnya beban pengeluaran masyarakat, melalui Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
    - Meningkatnya pendapatan masyarakat, melalui PDRB per kapita.
    - Meningkatnya akses lapangan kerja, melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
6. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
    - Menurunnya dampak perubahan iklim, melalui indikator Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Indek Kualitas Lingkungan Hidup
    - Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan, melalui indikator Indeks risiko bencana.
    - Menurunnya kawasan banjir dan rob, melalui indikator persentase kawasan banjir dan rob.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat
    - Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional.
    - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.
    - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berikut tujuan, sasaran, indikator, dan target Kinerja yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029:

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mendukung pencapaian **misi Pembangunan daerah ke 7 yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas** yang berkaitan pula dengan **pokok visi 4 Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif** melalui **Tujuan pada Misi 7 Pembangunan Daerah yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh Masyarakat.**

Sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Badan Pendapatan Daerah yaitu sasaran ke 17 yaitu “Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan beriorientasi hasil”. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Strategi yang diperlukan dalam pencapaian sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 meningkatnya pemerintahan yang responsif dan beriorientasi hasil yang selaras dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu “peningkatan akuntabilitas kinerja”. Dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, Kota Semarang tidak hanya

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hasilnya, layanan publik menjadi lebih responsif, tepat sasaran, dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Arah Kebijakan daerah Kota Semarang pada tahun 2025- 2029 dalam pencapaian misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029yang selaras dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan,dan bebas korupsi

Secara lengkap peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

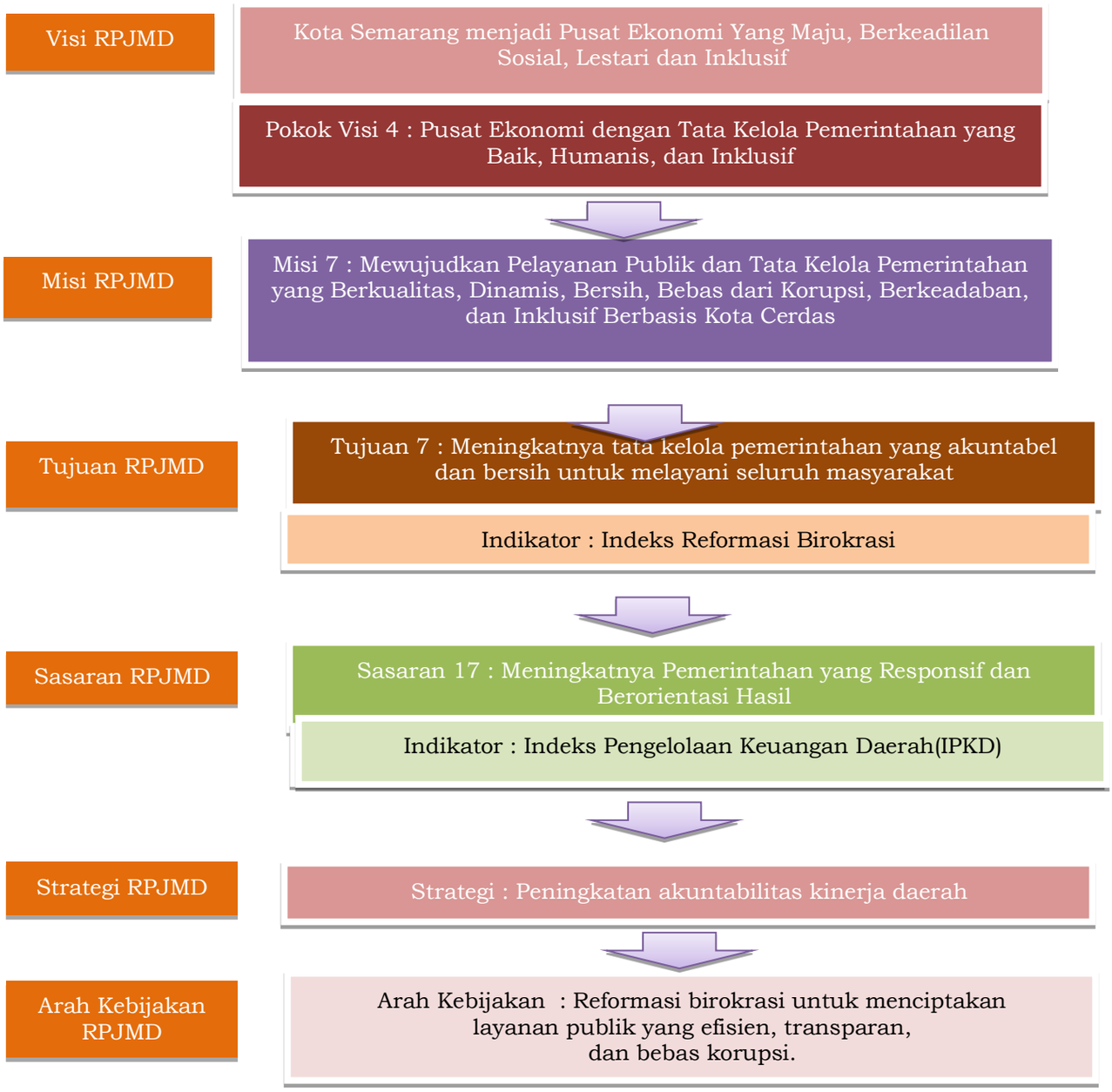

Gambar 2.5
Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam Mendukung Pencapaian
Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

c. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029

Visi Kementrian Keuangan 2025-2029 :

"Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi yang mendukung visi tersebut, meliputi :

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif dan adaptif
2. Meningkatkan pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan, dan mendukung perekonomian
3. Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang berdampak bagi kesejahteraan rakyat
4. Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi dalam pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaa dan risiko
5. Mewujudkan Pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam budaya "Kemenkeu Satu" untuk mendukung transformasi birokrasi

Strategi utama dan inisiatif kelembagaan

- **Transformasi struktural** : Kemenkeu memperkuat dan memperbarui struktur dengan penambahan **2 Direktorat Jenderal** (Strategi Ekonomi & Fiskal; Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan) dan **1 Badan baru** (Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan) untuk mempertegas arah kebijakan dan strategis eselon I
- **Reformasi proses bisnis:** Mulai bergeser dari paradigma process-based ke outcome-based untuk memastikan hasil nyata dari setiap kebijakan dan pengelolaan institusi

Inisiatif Strategis Terkini

- **Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025:** Fokus pada interoperabilitas sistem ("Core Revenue System") antar-lembaga, pemanfaatan big data di sektor industri dan SDA, regulasi harmonis, serta sinkronisasi rantai proses bisnis di sektor prioritas. Inisiasi melibatkan:

  1. Joint Program kolaborasi antar unit eselon I untuk wajib pajak belum ter-cover.
  2. Perpajakan transaksi digital domestik dan internasional.
  3. Intensifikasi PNBP dari SDA seperti batubara, nikel, timah.
  4. Penguatan layanan premium PNBP di sektor imigrasi, kepolisian, perhubungan

- **Pengelolaan aset dan kekayaan negara (DJKN):** Pada 2025, terdapat 13 kegiatan strategis, meliputi 7 kegiatan lanjutan seperti sertifikasi BMN, sinkronisasi pengelolaan aset, RUU Kekayaan Negara, serta 6 inisiatif baru seperti pemanfaatan BUMN

berkelanjutan, penguatan fiskal SDA, dan pengembangan sistem informasi aset (SIPN+, SIHM)

Fokus Lain: Reformasi Birokrasi & Digitalisasi

- **Transformasi kelembagaan:** Menekankan perbaikan struktur organisasi, modernisasi layanan, digitalisasi, serta konsolidasi budaya kerja "Kemenkeu Satu." Tema sentral: penerimaan, belanja, dan modernisasi layanan. DJPb turut mendukung dengan inovasi sistem pembayaran, integrasi sistem, dan penguatan manajemen aset dan kas

d. Telaahan Renstra Bapenda Propinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Bapenda Propinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Bapenda Propinsi Jawa Tengah adalah Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah demi Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Bapenda Propinsi Jawa Tengah, Sasaran Bapenda Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pajak Daerah
b. Meningkatnya retribusi daerah dan pendapatan lain

Dengan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

a. Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
b. Persentase pertumbuhan retribusi daerah dan pendapatan lain

Permasalahan pokok yang dihadapi Bapenda Propinsi Jawa Tengah adalah:

a. Belum optimalnya kebijakan dan struktur organisasi dan tata kerja
b. Belum optimalnya perencanaan dan pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain daerah
c. Belum optimalnya system informasi dan sarana prasarana
d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas penerimaan pendapatan asli daerah
e. Belum optimalnya penerimaan pajak, retribusi dam pendapatan lain daerah serta tingginya piutang daerah

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembengan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2013 dijabarkan sebagai berikut:

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra Kota Semarang adalah telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) . Perencanaan yang merupakan perencanaan berbasis spasial ini meliputi seluruh wilayah Kota Semarang dengan luas keseluruhan sebesar lebih kurang 372,3 Km^2 atau 37230 Ha. Penataan ruang wilayah Kota Semarang ini bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Perencanaan tata ruang wilayah memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.

Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui :

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
c. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan strategis.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam lima tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang maka dalam pelaksanaannya tidak berpotensi melakukan pelanggaran dan keterkaitan/implikasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Senantiasa memperhatikan RTRW perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang hubungannya denga RTRW secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah, perlu diperhatikan analisis RTRW agar hasil-hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap

lingkungan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tidak dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Perumusan isu strategis KLHS RPJMD daerah Kota Semarang mempertimbangkan beberapa komponen penyusun isu strategis yaitu:

(i) isu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan;

(ii) isu lingkungan hidup;

(iii) isu hasil konsultasi publik dan dokumen kebijakan strategis lainnya. Berdasarkan hasil perumusan isu tersebut, maka didapatkan isu strategis daerah Kota Semarang meliputi:

1) Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2) Belum optimalnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 4-39 distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender;
3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah;
4) Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim;
5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan;
7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berikut ditampilkan rincian isu strategis KLHS RPJMD Kota Semarang

Gambar 2.6

Tabel 2.123 Masalah dan Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

PILAR	MASALAH STRATEGIS	ISU STRATEGIS
Sosial	• Masih kurangnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah • Masih kurangnya kualitas pendidikan yang mengikuti kemajuan jaman dan teknologi • Masih kurangnya kualitas sarana prasarana pendidikan • Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran peneraoan pola hidup sehat	Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
	• Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan • Masih kurangnya kesetaraan gender • Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dan perempuan	Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender
Ekonomi	• Belum optimalnya distribusi kesejahteraan • Masih kurangnya konsribusi sektor terhadap kesejahteraan • Belum optimalnya dukungan sektor keuangan • Masih kurangnya dukungan industri hijau	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah
Lingkungan	• Masih kurangnya ketahanan terhadap bencana	Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim
	• Belum optimalnya pengelolaan terhadap sumber air baku dan pelayanan air bersih yang aman dan layak untuk semua • Masih kurangnya dukungan prasarana sanitasi dan limbah yang mendukung keberlanjutan lingkungan	Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi
	• Masih kurangnya dukungan terhadap energi alternatif berkelanjutan • Masih kurangnya dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan ruang terbuka hijau (RTH) • Masih kurangnya dukungan terhadap transportasi publik berkelanjutan	Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan
Tata Kelola Kelembagaan	• Belum optimalnya penerimaan pemerintah • Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel • Belum optimalnya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat • Belum optimalnya pelayanan aksesibilitas pitalebar	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Gambar 2.7

ISU TPB	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH	KONSULTASI PUBLIK	DRAF RANWAL RJPJD PROV. JATENG & KLHS RPJPD PROV. JATENG	SINTESA ISU STRATEGIS KLHS
	• Kota Semarang rawan terhadap bencana penurunan tanah/*land subsidence* (8-9cm/tahun), banjir, rob, gerakan tanah, longsor, dan kekeringan.	penyebab terjadinya kejadian bencana berulang	• Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana • Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	
Belum optimalnya pengelolaan terhadap sumber air baku dan pelayanan air bersih yang aman dan layak untuk semua	• Daya dukung air terlampaui • JLH penyedia air dan JLH pengatur air mayoritas berada pada kelas rendah dan sangat rendah • Nilai IKA tahun 2023 sebesar 46 masuk dalam kategori kurang		Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup	**Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi**
Masih kurangnya dukungan prasarana sanitasi dan limbah yang mendukung keberlanjutan lingkungan	Belum optimalnya pengolahan sampah di Kota Semarang. Sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah hanya 11%	• Perlu adanya pengolah limbah untuk mengurangi pencemaran air sungai • Pengelolaan sampah plastik belum optimal		
Masih kurangnya dukungan terhadap energi alternatif berkelanjutan				**Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan**
Masih kurangnya dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan ruang terbuka hijau (RTH)	Nilai IKL Kota Semarang tahun 2023 sebesar 31,63 masuk dalam kategori kurang	• Perlu strategi pengadaan RTH agar mencapai 30% • Perlu pengarusutamaan perlindungan dan pengembangan mangrove		
Masih kurangnya dukungan terhadap transportasi publik berkelanjutan				
Belum optimalnya penerimaan pemerintah			• Belum optimalnya reformasi birokrasi • Tata kelola pemerintahan yang dinamis	**Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab**
Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel				

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Permasalahan isu strategis KLHS RPJMD mengenai tata kelola pemerintahan di Kota Semarang yaitu terkait belum optimalnya penerimaan pemerintah, belum optimalnya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta belum optimalnya pelayanan aksesibilitas internet.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah terkait Belum Optimalnya penerimaan daerah.

Tabel 2.8.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Pilar	TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Tata Kelola Kelembagaan	Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggungjawab	Belum optimalnya penerimaan daerah

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Gambar 2.8
Rekomendasi untuk penyelesaian isu strategis dalam KLHS

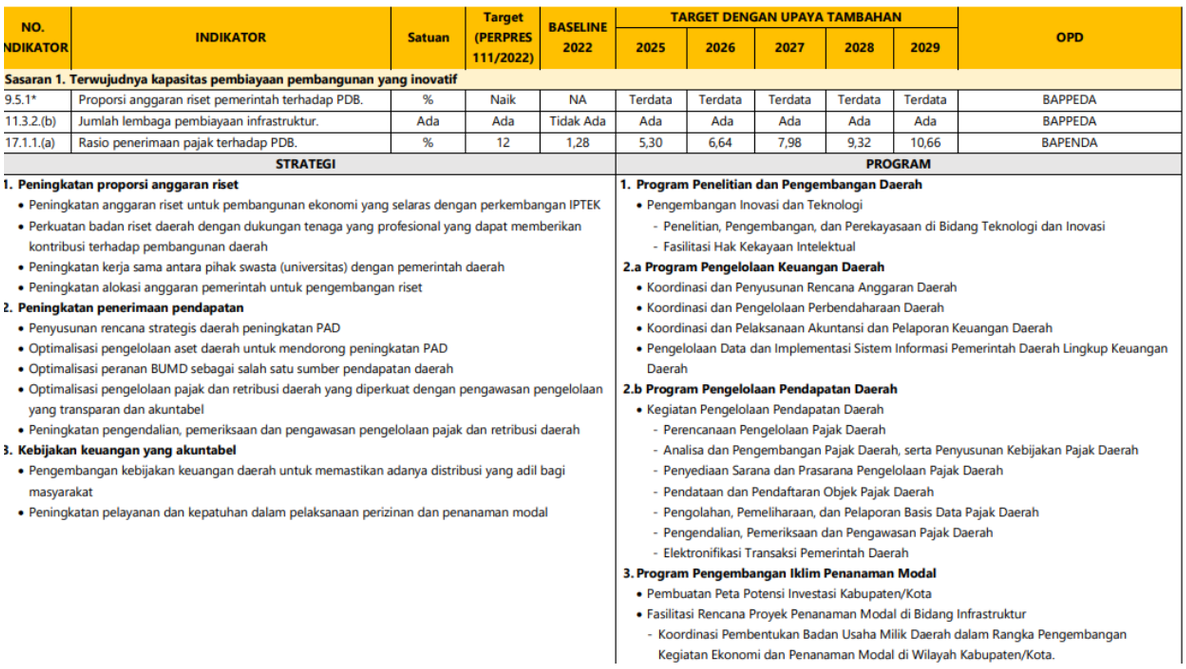

NO. NDIKATOR	INDIKATOR	Satuan	Target (PERPRES 111/2022)	BASELINE 2022	TARGET DENGAN UPAYA TAMBAHAN					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran 1. Terwujudnya kapasitas pembiayaan pembangunan yang inovatif										
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	%	Naik	NA	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	BAPPEDA
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	12	1,28	5,30	6,64	7,98	9,32	10,66	BAPENDA

STRATEGI	PROGRAM
1. Peningkatan proporsi anggaran riset • Peningkatan anggaran riset untuk pembangunan ekonomi yang selaras dengan perkembangan IPTEK • Perkuatan badan riset daerah dengan dukungan tenaga yang profesional yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah • Peningkatan kerja sama antara pihak swasta (universitas) dengan pemerintah daerah • Peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan riset **2. Peningkatan penerimaan pendapatan** • Penyusunan rencana strategis daerah peningkatan PAD • Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk mendorong peningkatan PAD • Optimalisasi peranan BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah • Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang diperkuat dengan pengawasan pengelolaan yang transparan dan akuntabel • Peningkatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah **3. Kebijakan keuangan yang akuntabel** • Pengembangan kebijakan keuangan daerah untuk memastikan adanya distribusi yang adil bagi masyarakat • Peningkatan pelayanan dan kepatuhan dalam pelaksanaan perizinan dan penanaman modal	**1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** • Pengembangan Inovasi dan Teknologi - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual **2.a Program Pengelolaan Keuangan Daerah** • Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah • Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah • Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah **2.b Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** • Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah **3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** • Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota • Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur - Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.9.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Semarang Tahun 2025-2029
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario/Upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	5,30	6,64	7,98	9,32	10,66	12	1. Penyusunan rencana strategis daerah peningkatan PAD 2. Optimalisasi Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang diperkuat dengan pengawasan Pengelolaan yang transparan dan akuntabel 3. Peningkatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawsan Pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

g. Telaahan Dokumen Lainnya

Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kota Layak Anak (KLA)

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki peran tidak langsung dalam mendukung kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) dan Kota Layak Anak (KLA) melalui peningkatan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Meski dokumen rencana strategis (renstra) tidak secara eksplisit menyebutkan PUG dan KLA, beberapa kebijakan dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Peran dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah mempertimbangkan pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan. Dimana peran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat terwujud melalui:

- **Peningkatan Efektivitas Birokrasi**: Dengan fokus pada reformasi birokrasi, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang berupaya menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi. Birokrasi yang bersih dan efisien ini dapat memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengakses layanan perpajakan tanpa diskriminasi.
- **Optimalisasi Pelayanan Perpajakan**: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang berupaya meningkatkan optimalisasi layanan perpajakan yang berbasis website. Layanan digital ini dapat memberikan kemudahan akses bagi perempuan pelaku usaha atau profesional yang mungkin memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor.
- **Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak**: Program peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak harus dirancang agar menjangkau semua gender, termasuk perempuan yang menjadi penanggung jawab keuangan rumah tangga atau pengusaha.

Peran dalam Kota Layak Anak (KLA)

KLA bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Keterkaitan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dengan KLA dapat dilihat dari perannya dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai program-program perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak mereka.

- **Optimalisasi Penggalian Sumber Pendapatan Daerah**: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang bertugas menggali potensi pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan ini akan menambah alokasi dana untuk pembangunan kota, termasuk program-program yang mendukung terwujudnya Kota Layak Anak seperti pembangunan fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan anak.
- **Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan**: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang juga berfokus pada peningkatan efektivitas tata kelola kelembagaan dan ketersediaan tenaga kerja yang berkualifikasi. Hal ini akan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, yang berdampak positif pada alokasi anggaran untuk program KLA.

Dengan demikian, meskipun secara langsung tidak tertulis dalam dokumen, Bapenda berperan dalam PUG dan KLA melalui fungsi utamanya dalam mengoptimalkan pendapatan dan mengelola keuangan daerah secara efektif, yang pada akhirnya akan mendukung pembiayaan program-program pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. **Optimalisasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak dengan Sistem Informasi Pajak**

   Optimalisasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak melalui penerapan Sistem Informasi Pajak menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan penerimaan daerah yang mandiri. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat memiliki data yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah diakses mengenai profil wajib pajak serta potensi objek pajak yang ada. Sistem Informasi Pajak memungkinkan pendataan dan pengawasan yang lebih efektif, serta meminimalkan kebocoran penerimaan akibat data yang tidak lengkap atau tidak terpantau. Selain itu, penerapan sistem ini mempermudah pengelolaan dan penagihan pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan potensi PAD. Melalui penguatan data pajak yang berbasis teknologi, pemerintah daerah dapat memaksimalkan sumber daya internal dan bergerak menuju kemandirian fiskal yang lebih baik.

b. **Optimalisasi pelayanan dan ketepatan penetapan pajak daerah**

   Optimalisasi pelayanan dan keteparan penetapan pajak daerah sangat penting dalam mewujudkan penerimaan daerah yang mandiri. Pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien akan mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketepatan penetapan pajak daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan kondisi sebenarnya dari objek pajak. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah daerah dapat menyediakan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online, yang mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Ketepatan penetapan pajak mencegah terjadinya pajak yang terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga setiap wajib pajak dikenai pajak secara adil dan proporsional sesuai dengan kapasitas dan objek pajaknya. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pajak, penyederhanaan proses administrasi, dan penegakan aturan yang konsisten juga membantu mengurangi potensi kebocoran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah. Dengan layanan yang optimal, penerimaan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mendukung kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

c. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

   Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah yang mandiri. Dengan penerapan sistem berbasis TI, seperti aplikasi dan portal pajak online, proses pendataan, penagihan, hingga pelaporan pajak menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat. Teknologi ini juga mempermudah wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban mereka secara fleksibel, mengurangi ketergantungan pada pelayanan tatap muka, serta meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk memonitor kepatuhan wajib pajak secara real-time dan menganalisis potensi penerimaan pajak dari berbagai sektor, sehingga kebocoran pendapatan bisa diminimalkan. Dengan TI, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah, mendukung kemandirian fiskal, serta mendorong pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

d. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundangan

Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundangan merupakan upaya penting untuk mencapai penerimaan daerah yang mandiri. Intensifikasi mencakup peningkatan penerimaan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dengan memaksimalkan pemungutan pajak dan retribusi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih efektif dan efisien. Sementara itu, ekstensifikasi melibatkan perluasan basis pajak dan penggalian potensi pendapatan baru, seperti mengenakan pajak pada objek pajak yang sebelumnya belum teridentifikasi atau kurang tergarap. Upaya ini harus dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, agar tetap sesuai dengan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan mengintensifkan dan mengekstensifkan sumber-sumber pendapatan ini secara bijak dan sesuai regulasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan, mendukung kemandirian fiskal, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

e. Optimalisasi pengelolaan kelembagaan yang mendukung terwujudnya good governance

Optimalisasi pengelolaan kelembagaan yang mendukung terwujudnya good governance sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah yang mandiri. Kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel akan mampu mengelola sumber daya daerah dengan efektif, sehingga setiap potensi penerimaan dapat digarap secara optimal. Good governance dalam kelembagaan meliputi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efisiensi, yang dapat mengurangi risiko kebocoran anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan menerapkan struktur kelembagaan yang profesional dan berintegritas, serta pemanfaatan teknologi dalam operasionalnya, pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi secara lebih terarah dan efisien. Hal ini tidak hanya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan, tetapi juga membangun kemandirian fiskal yang tangguh dalam jangka panjang.

Gambar 2.9
Permasalahan dan Isu Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Isu Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah	Belum optimalnya pendataan dan pendaftaran pajak daerah	Belum optimalnya penerimaan daerah	Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Optimalisasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak dengan Sistem Informasi Pajak
	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dan ketepatan penetapan pajak berbasis data yang terintegrasi					Optimalisasi pelayanan dan ketepatan penetapan pajak daerah

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak					Pemanfataan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah
	Belum optimalnya penggalian sumber pendapatan asli daerah;					Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan
	Belum efektifnya tata kelola kelembagaan Bapenda.					Optimalisasi pengelolaan kelembagaan yang mendukung terwujudnya good governance

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Keterangan:

1	Potensi kelebihan dari daerah
2	Permasalahan perangkat daerah yang terdapat di tabel 2.7
3	Isu KLHS yang terdapat di tabel 2.8
4	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang bersifat global yang relevan dengan urusan
5	Isu yang terdapat dokumen RPJMN yang level nasional yang relevan dengan urusan
6	Isu yang terdapat dokumen RPJMD Provinsi/Kab/Kota yang relevan dengan urusan
7	Hasil analisis isu strategis urusan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang keuangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah ”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang, yaitu “Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah”.

Indikator ini diukur dari persentase capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengeloaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang, dimana Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan

Daerah Kota Semarang terkait peningkatan kualitas layanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**

Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)"

Indikator ini diukur dari persentase capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengeloaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengeloaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

2. **Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang**

a. Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah".

Indikator ini diukur dari hasil penilaian terhadap AKIP (Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja.

b. Dengan indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah"

Indikator ini diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang mereka terima.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) tehadap Pendapatan Daerah	%	54,57	56,24	57,91	59,57	60,24	61,24	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tehadap realisasi pendapatan daerah dikalikan 100%
		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	100	100	100	100	100	100	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan 100%
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan Daerah	Angka	79,90	79,91	79,92	79,93	79,94	79,95	hasil penilaian terhadap AKIP (Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta Capaian KinerjaDaerah Kota Semarang Kota Semarang
			Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah	Angka	96,43	96,44	96,45	96,46	96,47	96,48	hasil survey kepuasan masyarakat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang

Sumber :

- *Bapenda Kota Semarang Tahun 2025-2029*
- *Bapenda Kota Semarang* Tahun 2025
- *LHE AKIP Bapenda Kota Semarang Tahun 2025*
- *Bapenda Kota Semarang* Tahun 2025

Keterangan:

1	Sasaran dalam dokumen RPJMD yang dapat didukung oleh PD terkait
2	Tujuan PD minimal 1 kalimat tujuan
3	Sasaran Perangkat Daerah
4	Indikator tujuan maupun sasaran
5	Satuan dari indikator
6	Target indikator
7	Target indikator
8	Target indikator
9	Target indikator
10	Target indikator
11	Target indikator
12	Dapat diisi definisi operasional atau rumus indikator

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan optimalisasi pendataan dan pendaftaran pajak daerah	Peningkatan optimalisasi pendataan dan pendaftaran pajak daerah	Penguatan optimalisasi pendataan dan pendaftaran pajak daerah	Akselerasi optimalisasi pendataan dan pendaftaran pajak daerah	Perwujudan optimalisasi pendataan dan pendaftaran pajak daerah
Pengembangan optimalisasi pemenuhan pelayanan dan ketepatan penetapan pajak berbasis data yang terintegrasi	Peningkatan optimalisasi pemenuhan pelayanan dan ketepatan penetapan pajak berbasis data yang terintegrasi	Penguatan optimalisasi pemenuhan pelayanan dan ketepatan penetapan pajak berbasis data yang terintegrasi	Akselerasi optimalisasi pemenuhan pelayanan dan ketepatan penetapan pajak berbasis data yang terintegrasi	Perwujudan optimalisasi pemenuhan pelayanan dan ketepatan penetapan pajak berbasis data yang terintegrasi
Pengembangan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	Penguatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	Akselerasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	Perwujudan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
Pengembangan optimalisasi penggalian sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan optimalisasi penggalian sumber pendapatan asli daerah	Penguatan optimalisasi penggalian sumber pendapatan asli daerah	Akselerasi optimalisasi penggalian sumber pendapatan asli daerah	Perwujudan optimalisasi penggalian sumber pendapatan asli daerah
Pengembangan efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Peningkatan efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Penguatan efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Akselerasi efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Perwujudan efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Penjelasan atas Tahapan Strategi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

TAHAP I (2026)

Tahap pertama di tahun 2026 berfokus pada **pengembangan** atau pembangunan fondasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan efisien dalam pengelolaan pajak daerah.

- Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah: Fokus pada peningkatan dan pengembangan pendataan serta pendaftaran pajak daerah.
- Optimalisasi Pelayanan dan Penetapan Pajak: Membangun sistem pelayanan yang lebih baik dan memastikan ketepatan penetapan pajak dengan mengintegrasikan data.

- Pengembangan Kepatuhan Wajib Pajak: Upaya difokuskan untuk mengembangkan kepatuhan wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak.
- Optimalisasi Penggalian Sumber PAD: Mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.
- Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang: Meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

TAHAP II (2027)

Di tahun 2027, tahap kedua berfokus pada **peningkatan** dari fondasi yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk menguatkan sistem dan proses yang sudah ada agar berjalan lebih optimal.

- Peningkatan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah: Meneruskan upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendataan serta pendaftaran pajak daerah.
- Peningkatan Optimalisasi Pelayanan dan Penetapan Pajak: Meningkatkan kualitas pelayanan dan ketepatan penetapan pajak yang berbasis data terintegrasi.
- Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Melanjutkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- Peningkatan Optimalisasi Penggalian Sumber PAD: Meningkatkan optimalisasi penggalian sumber pendapatan asli daerah.
- Peningkatan Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang: Meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang sudah dibangun sebelumnya.

TAHAP III (2028)

Tahap ketiga di tahun 2028 berfokus pada **penguatan** sistem yang telah ditingkatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah membuat seluruh sistem menjadi lebih kokoh dan stabil.

- Penguatan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah: Menguatkan sistem pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
- Penguatan Optimalisasi Pelayanan dan Penetapan Pajak: Menguatkan sistem pelayanan dan penetapan pajak yang berbasis data terintegrasi.
- Penguatan Kepatuhan Wajib Pajak: Memperkuat kepatuhan wajib pajak agar semakin disiplin dalam membayar pajak.
- Penguatan Optimalisasi Penggalian Sumber PAD: Menguatkan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- Penguatan Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang: Memperkuat efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

TAHAP IV (2029)

Pada tahun 2029, tahap keempat berfokus pada **akselerasi** atau percepatan. Tahap ini bertujuan untuk mempercepat proses yang sudah kokoh dan stabil agar hasil yang dicapai bisa lebih maksimal.

- Akselerasi Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah: Mempercepat optimalisasi pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
- Akselerasi Optimalisasi Pelayanan dan Penetapan Pajak: Mempercepat optimalisasi pelayanan dan ketepatan penetapan pajak yang berbasis data terintegrasi.

- Akselerasi Kepatuhan Wajib Pajak: Mempercepat peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- Akselerasi Optimalisasi Penggalian Sumber PAD: Mempercepat optimalisasi penggalian sumber pendapatan asli daerah.
- Akselerasi Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang: Mempercepat peningkatan efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

TAHAP V (2030)

Tahap terakhir di tahun 2030 adalah **perwujudan** atau realisasi dari semua upaya yang sudah dilakukan. Di tahap ini, diharapkan seluruh tujuan dan target yang telah ditetapkan bisa terwujud secara optimal.

- Perwujudan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah: Mewujudkan optimalisasi pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
- Perwujudan Optimalisasi Pelayanan dan Penetapan Pajak: Mewujudkan optimalisasi pelayanan dan ketepatan penetapan pajak yang berbasis data terintegrasi.
- Perwujudan Kepatuhan Wajib Pajak: Mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- Perwujudan Optimalisasi Penggalian Sumber PAD: Mewujudkan optimalisasi penggalian sumber pendapatan asli daerah.
- Perwujudan Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang: Mewujudkan efektivitas tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

3.2.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Gambar 3.1
Visi, Misi,Tujuan,Sasaran dan Strategi Kota Semarang
Tahun 2025-2029

Pokok Visi: Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif			
Misi 7: Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas			
T7: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	17	Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Peningkatan akuntabilitas kinerja daerah
	18	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan birokrasi pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.
	19	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Meningkatkan partisipasi masyarakat yang substantif dalam pembangunan secara inklusif.

Sumber : RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Gambar 3.2

Arah kebijakan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
5	MISI 5: Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	• Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi publik. • Integrasi transportasi antarwilayah dan pengembangan sistem angkutan massal ramah lingkungan. • Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal dan kawasan pengembangan baru. • Pengembangan infrastruktur digital (*smart connectivity*) sebagai bagian kota cerdas. • Penyediaan infrastruktur yang inklusif bagi kelompok rentan dan difabel.	
6	MISI 6: Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat	• Penguatan sistem drainase kota dan peningkatan pengendalian banjir dan rob. • Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu untuk mengurangi dampak perubahan iklim. • Peningkatan ruang terbuka hijau dan pelestarian kawasan lindung. • Pengembangan sistem peringatan dini bencana dan kapasitas tanggap darurat masyarakat. • Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular dan teknologi ramah lingkungan.	
7	MISI 7: Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas	• Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi. • Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan. • Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. • Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan sistem merit. • Pengembangan kota cerdas untuk pengelolaan kota berbasis data.	

Sumber : RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
	Meningkatnya pemerintahan yang responsive dan berorientasi hasil	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan public yang efisien, transparan dan bebas korupsi	1. Peningkatan pemutakhiran subjek dan objek Pajak Daerah I dan Pajak Daerah II 2. Peningkatan optimalisasi atas potensi pajak yang belum tergali dari sektor Pajak Daerah I dan Pajak Daerah II	
			1. Peningkatan optimalisasi layanan kebutuhan perpajakan bagi wajib pajak yang memanfaatkan layanan pajak berbasis website 2. Peningkatan optimalisasi penetapan pajak daerah yang tepat	
			1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah I dan Pajak Daerah II 2. Peningkatan optimalisasi penagihan Pajak Daerah I dan Pajak Daerah II	
			1. Peningkatan optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah penghasil dalam menggali potensi retribusi dan APD lainnya 2. Peningkatan optimalisasi penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan pajak daerah	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			1. Peningkatan Upaya optimalisasi tertib keuangan Peningkatan Upaya optimalisasi tertib keuangan 2. Peningkatan penyediaan sarana prasarana penunjang kinerja Bapenda 3. Tersedianya tenaga yang berkualifikasi tertentu	

Penjelasan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.3 adalah sebagai berikut :

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang relevan dengan tujuan Meningkatnya pemerintahan yang responsive dan berorientasi hasil adalah "Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi".

Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang saling mendukung:

- Peningkatan Pemutakhiran Subjek dan Objek Pajak Daerah I dan II: Ini adalah upaya untuk memperbarui data subjek dan objek pajak daerah guna memastikan keakuratan dan kelengkapan data.
- Peningkatan Optimalisasi Potensi Pajak: Kebijakan ini berfokus pada penggalian potensi pajak yang belum tergarap dari sektor Pajak Daerah I dan II.
- Peningkatan Optimalisasi Layanan Berbasis Website: Peningkatan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak yang memanfaatkan layanan berbasis website juga menjadi fokus.
- Peningkatan Optimalisasi Penetapan Pajak Daerah yang Tepat: Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan pajak daerah dilakukan secara tepat dan akurat.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah I dan II.
- Peningkatan Optimalisasi Penagihan Pajak: Optimalisasi penagihan Pajak Daerah I dan II juga menjadi salah satu arah kebijakan.
- Peningkatan Optimalisasi Koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil: Koordinasi dengan perangkat daerah penghasil ditingkatkan untuk menggali potensi retribusi dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.
- Peningkatan Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi: Kebijakan ini berfokus pada penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan pajak daerah.
- Peningkatan Upaya Optimalisasi Tertib Keuangan: Upaya ini ditingkatkan untuk menciptakan tertib keuangan yang lebih baik.
- Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Badan Pendapatan Daerah: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja Badan Pendapatan Daerah.

- Tersedianya Tenaga Berkualifikasi Tertentu: Memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang relevan untuk mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

TABEL 4.1

Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
Meningkatnya pemerintahan yang responsive dan berorientasi hasil	**Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah**				**Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah**		**Kepala Badan Pendapatan Daerah**
		Meningkatnya pendapatan asli daerah			**Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah**		**Kepala Badan Pendapatan Daerah**
			Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah		**Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya akuntabilitas pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I	**Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I yang akuntabel**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ka Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I**
				Terpenuhinya jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Staf Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
				Meningkatnya akuntabilitas pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II	**Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II yang akuntable**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ka Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II**
				Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Staf Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
				Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Staf Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya efektivitas penyusunan data dan analisis potensi pajak daerah.	**Jumlah analisis potensi pajak daerah yang disusun**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ketua Tim Kerja**
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Staf Bidang Pendaftaran dan Pendataan
			Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah		**Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah**
				Meningkatnya penyelesaian dokumen pelayanan wajib pajak daerah	**Persentase terselesaikanya dokumen pelayanan wajib pajak daerah**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ka. Subbid Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**
				Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Staf Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kualitas penghitungan pajak daerah secara tepat	**Persentase terpenuhinya penghitungan pajak daerah secara tepat**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ka. Subbid Penetapan Pajak Daerah**
				Tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Staf Subbidang Penetapan Pajak Daerah
				Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	**Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak daerah**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ketua Tim Kerja**
				Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Staf Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah
			Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah		**Persentase kepatuhan wajib pajak daerah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kepala Bidang Penagihan**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah I dan penatausahaan piutangnya	**Persentase wajib pajak daerah I yang tertagih dan penatusahaan piutangnya**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ka. Subbidang Penagihan Pajak Daerah I**
				Terlaksananya penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Staf Subbidang Penagihan Pajak Daerah I
				Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah II dan penatausahaan piutangnya	**Persentase wajib pajak daerah II yang tertagih dan penatusahaan piutangnya**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ka. Subbidang Penagihan Pajak Daerah II**
				Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Staf Subbidang Penagihan Pajak Daerah II
				Meningkatnya ketersediaan data pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan	**Jumlah laporan penerimaan pajak daerah yang disusun**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ketua Tim Kerja**
				Terlaksananya keberatan penyelesaian pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Staf Bidang Penagihan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah		**Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
				Meningkatnya kualitas pengelolaan data base pajak daerah dan retribusi yang akuntabel	**Persentase database pajak daerah yang akuntabel**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ka. Subbidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
				Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Staf Subbidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Staf Subbidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Meningkatnya kualitas proses pengawasan dan pengendalian pendapatan pajak dan retribusi daerah	**Persentase pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ka. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Staf Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Meningkatnya kualitas dan integrasi sistem informasi perpajakan daerah	**Jumlah laporan berbasis sistem yang digunakan dalam pengambilan kebijakan**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Ketua Tim Kerja**
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Staf Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Terlaksananya upaya mengubah transaksi tunai menjadi non tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Staf Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah			**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan Daerah**		**Kepala Badan Pendapatan Daerah**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah		**Kepala Badan Pendapatan Daerah**
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah		**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sekretaris Badan**
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah**	**Ketua Tim Kerja**
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Sekretariat
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Sekretariat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Sekretariat
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Sekretariat
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Staf Sekretariat
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Sekretariat
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Sekretariat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ka. Subbag Keuangan dan Barang Milik Daerah**
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah		**Sekretaris Badan**
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah	**Nilai layanan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian**
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian**
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah yang selesai ditindaklanjuti**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian**
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian**
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/Subkegiatan)	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Meringankan pajak bumi dan bangunan serta pajak daerah lainnya juga Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Gambar 4.1
Program Prioritas RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya stasiun pompa dalam kondisi baik	Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rekondisi Kartini Drain, termasuk Stasiun Pompa
Pusat ekonomi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, humanis, dan inklusif	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat**			**Indeks Reformasi Birokrasi**		
		Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
			Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan kinerja yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
						Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya
			Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Penguatan riset dan inovasi daerah
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		
			Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meringankan pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah lainnya
			Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
			daerah dalam mendukung pembangunan daerah			
			Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya

Sumber : RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Meringankan pajak bumi dan bangunan serta pajak daerah lainnya	Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya	Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
		Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	
			Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Urusan Keuangan						**101.846.082.270**		**113.163.771.804**		**118.089.757.091**		**118.994.590.593**		**121.128.905.435**	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						**15.621.514.952**		**21.022.736.779**		**23.867.392.570**		**24.723.697.878**		**25.445.184.619**	
	Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	**Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah**	**%**	**N/A**	**1,12%**	**2.246.787.370**	**1,13%**	**3.348.748.337**	**1,14%**	**3.716.905.401**	**1,16%**	**3.870.127.387**	**1,18%**	**4.021.095.294**	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah															
	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I	**Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I yang akuntabel**	**%**	**N/A**	**1,96%**	**424.588.570**	**1,97%**	**967.047.427**	**1,98%**	**1.063.752.170**	**1,99%**	**1.170.127.387**	**2,00%**	**1.271.095.294**	
5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak	Terpenuhinya jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	86.000	21600	424.588.570	24.300	967.047.427	27.337	1.063.752.170	30.754	1.170.127.387	34.598	1.271.095.294	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II	**Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II yang akuntable**	**%**	**N/A**	**4,07%**	**1.622.198.800**	**4,08%**	**1.861.700.910**	**4,09%**	**2.081.153.231**	**4,10%**	**2.100.000.000**	**4,11%**	**2.150.000.000**	
5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	N/A	4	60.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10	12	1.562.198.800	12	1.761.700.910	12	1.981.153.231	12	2.000.000.000	12	2.050.000.000	
	Meningkatnya efektivitas penyusunan data dan analisis potensi pajak daerah.	**Jumlah analisis potensi pajak daerah yang disusun**	**Dokumen**	**N/A**	**2**	**200.000.000**	**2**	**520.000.000**	**2**	**572.000.000**	**2**	**600.000.000**	**2**	**600.000.000**	
5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	N/A	2	200.000.000	2	520.000.000	2	572.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	**Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah**	**%**	**N/A**	**96,00 %**	**7.264.040.403**	**97,00%**	**8.733.726.674**	**98,00%**	**9.650.381.572**	**99,00%**	**10.058.546.799**	**100,00 %**	**10.281.069.969**	
	Meningkatnya penyelesaian dokumen pelayanan wajib pajak daerah	**Persentase terselesaikanya dokumen pelayanan wajib pajak daerah**	**%**	**N/A**	**86,00 %**	**3.234.602.496**	**87,00%**	**3.858.062.745**	**88,00%**	**4.243.869.020**	**89,00%**	**4.418.069.970**	**90,00%**	**4.521.069.969**	
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	12	12	3.234.602.496	12	3.858.062.745	12	4.243.869.020	12	4.418.069.970	12	4.521.069.969	
	Meningkatnya kualitas penghitungan pajak daerah secara tepat	**Persentase terpenuhinya penghitungan pajak daerah secara tepat**	**%**	**N/A**	**82,00 %**	**3.354.398.967**	**83,00%**	**3.933.121.095**	**84,00%**	**4.369.715.435**	**85,00%**	**4.500.000.000**	**86,00%**	**4.600.000.000**	
5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	3.354.398.967	12	3.933.121.095	12	4.369.715.435	12	4.500.000.000	12	4.600.000.000	
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	**Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak daerah**	**%**	**N/A**	**3,00%**	**675.038.940**	**3,10%**	**942.542.834**	**3,20%**	**1.036.797.117**	**3,30%**	**1.140.476.829**	**3,40%**	**1.160.000.000**	
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	8	12	675.038.940	12	942.542.834	12	1.036.797.117	12	1.140.476.829	12	1.160.000.000	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah	**Persentase kepatuhan wajib pajak daerah**	**%**	**N/A**	**69,00 %**	**3.989.811.040**	**70,00%**	**5.113.515.661**	**70,50%**	**5.789.155.177**	**71,00%**	**5.867.807.875**	**72,00%**	**5.970.000.000**	
	Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah I dan penatausahaan piutangnya	**Persentase wajib pajak daerah I yang tertagih dan penatusahaan piutangnya**	**%**	**N/A**	**10,50 %**	**3.356.533.490**	**11,00%**	**4.292.186.839**	**11,50%**	**4.945.693.473**	**12,00%**	**5.000.000.000**	**12,50%**	**5.100.000.000**	
5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	3.356.533.490	12	4.292.186.839	12	4.945.693.473	12	5.000.000.000	12	5.100.000.000	
	Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah II dan penatausahaan piutangnya	**Persentase wajib pajak daerah II yang tertagih dan penatusahaan piutangnya**	**%**	**N/A**	**23,03 %**	**432.069.530**	**23,13%**	**600.000.000**	**23,23%**	**600.000.000**	**23,33%**	**600.000.000**	**23,43%**	**600.000.000**	
5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	10	12	432.069.530	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
	Meningkatnya ketersediaan data pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan	**Jumlah laporan penerimaan pajak daerah yang disusun**	**Laporan**	**N/A**	**12**	**201.208.020**	**12**	**221.328.822**	**12**	**243.461.704**	**12**	**267.807.875**	**12**	**270.000.000**	
5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya keberatan penyelesaian pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian	Dokumen	12	12	201.208.020	12	221.328.822	12	243.461.704	12	267.807.875	12	270.000.000	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Keberatan Pajak Daerah													
	Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	**Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah**	**%**	**N/A**	**82,00 %**	**2.120.876.139**	**83,00%**	**3.826.746.107**	**84,00%**	**4.710.950.420**	**85,00%**	**4.927.215.817**	**86,00%**	**5.173.019.356**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan data base pajak daerah dan retribusi yang akuntabel	**Persentase database pajak daerah yang akuntabel**	**%**	**N/A**	**71,00 %**	**1.359.993.214**	**72,00%**	**2.339.274.766**	**73,00%**	**2.604.731.945**	**75,00%**	**2.723.019.356**	**75,00%**	**2.823.019.356**	
5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	8	6	597.966.404	6	1.157.763.044	6	1.273.539.349	6	1.300.000.000	6	1.400.000.000	
5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	3	12	762.026.810	12	1.181.511.722	12	1.331.192.596	12	1.423.019.356	12	1.423.019.356	
	Meningkatnya kualitas proses pengawasan dan pengendalian pendapatan	**Persentase pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah**	**%**	**N/A**	**67,70 %**	**181.965.786**	**67,80%**	**400.162.365**	**67,90%**	**640.178.601**	**68,00%**	**704.196.461**	**68,10%**	**750.000.000**	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pajak dan retribusi daerah														
5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	10	10	181.965.786	10	400.162.365	10	640.178.601	10	704.196.461	10	750.000.000	
	Meningkatnya kualitas dan integrasi sistem informasi perpajakan daerah	**Jumlah laporan berbasis sistem yang digunakan dalam pengambilan kebijakan**	**Dokumen**	**N/A**	**12**	**578.917.139**	**12**	**1.087.308.976**	**12**	**1.466.039.874**	**12**	**1.500.000.000**	**12**	**1.600.000.000**	
5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	12	443.008.160	12	787.308.976	12	1.166.039.874	12	1.200.000.000	12	1.300.000.000	
5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya upaya mengubah transaksi tunai menjadi non tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	N/A	2	135.908.979	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah**					**86.224.567.318**		**92.141.035.025**		**94.222.364.521**		**94.270.892.715**		**95.683.720.816**	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas	**%**	**N/A**	**100,00%**	**65.641.475.064**	**100,00 %**	**66.904.754.154**	**100,00%**	**68.119.797.731**	**100,00 %**	**68.961.607.823**	**100,00 %**	**70.174.340.293**	
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan**	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan**	**%**	**8**	**100**	**210.800.094**	**100**	**231.880.104**	**100**	**255.068.114**	**100**	**280.574.925**	**100**	**302.427.418**	
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	97.600.109	3	107.360.120	3	118.096.132	3	129.905.745	5	142.896.320	
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	9.011.400	1	9.912.540	1	10.903.794	1	11.994.173	1	13.193.591	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.610.900	1	11.671.990	1	12.839.189	1	14.123.108	1	15.535.419	
X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	8.655.400	1	9.520.940	1	10.473.034	1	11.520.338	1	12.672.371	
X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.954.900	1	4.350.390	1	4.785.429	1	5.263.972	1	5.790.369	
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	4	30.967.385	4	34.064.124	4	37.470.536	4	41.217.589	4	45.339.348	
X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	67.000.000	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan**	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan**	**%**	**100**	**100**	**65.430.674.970**	**100**	**66.672.874.050**	**100**	**67.864.729.617**	**100**	**68.681.032.898**	**100**	**69.871.912.875**	
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	116	134	64.777.368.340	134	65.854.236.757	134	66.964.228.595	134	68.108.792.825	134	69.289.448.794	
X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	76	48	651.623.630	48	816.785.993	48	898.464.592	48	570.000.000	48	580.000.000	
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	223.800	1	246.180	1	270.798	1	297.878	1	327.666	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	1.235.400	2	1.358.940	2	1.494.834	2	1.644.317	2	1.808.749	
X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	223.800	1	246.180	1	270.798	1	297.878	1	327.666	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	**%**	**N/A**	**90,25 %**	**20.583.092.254**	**90,50%**	**25.236.280.871**	**90,75%**	**26.102.566.790**	**91,00%**	**25.309.284.892**	**91,25%**	**25.509.380.523**	
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya**	**Nilai layanan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah**	**%**	**N/A**	**80**	**702.423.523**	**80,1**	**952.936.775**	**80,2**	**1.048.230.453**	**80,3**	**960.000.000**	**80,4**	**1.000.000.000**	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	aparatur Badan Pendapatan Daerah														
X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	2	229.942.523	2	252.936.775	2	278.230.453	2	290.000.000	2	300.000.000	
X.XX.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	46	300	242.481.000	300	300.000.000	300	330.000.000	300	300.000.000	300	310.000.000	
X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	12	80.000.000	12	150.000.000	12	165.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	
X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	30	150.000.000	30	250.000.000	30	275.000.000	30	270.000.000	30	280.000.000	
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan**	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**1.484.034.431**	**100**	**2.329.896.972**	**100**	**2.562.886.669**	**100**	**1.939.150.000**	**100**	**2.046.565.000**	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pendapatan Daerah														
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	63.670.500	10	100.000.000	10	110.000.000	10	80.000.000	10	88.000.000	
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	45	93.391.790	45	250.000.000	45	275.000.000	45	115.000.000	45	120.000.000	
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	90	24	103.320.646	24	213.652.711	24	235.017.982	24	130.000.000	24	140.000.000	
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	8	202.667.510	10	322.934.261	10	355.227.687	10	250.000.000	10	260.000.000	
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	12	12.000.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	19.965.000	
X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72	60	37.500.000	60	60.000.000	60	66.000.000	60	46.000.000	60	50.600.000	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	687.105.375	50	1.000.000.000	50	1.100.000.000	50	950.000.000	50	1.000.000.000	
X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	62.100.000	1	68.310.000	1	75.141.000	1	80.000.000	1	88.000.000	
X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	70	3	222.278.610	3	300.000.000	3	330.000.000	3	270.000.000	3	280.000.000	
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**350.453.318**	**100**	**885.498.650**	**100**	**924.048.515**	**100**	**934.028.258**	**100**	**947.431.084**	
X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	0	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3	65.029.160	3	71.532.076	3	78.685.284	3	80.000.000	3	88.000.000	
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	282.397.668	6	310.637.435	6	341.701.178	6	350.000.000	6	355.000.000	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5	3.026.490	5	3.329.139	5	3.662.053	5	4.028.258	1	4.431.084	
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah yang selesai ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**16.392.223.716**	**100**	**19.184.033.000**	**100**	**19.495.094.132**	**100**	**19.535.026.604**	**100**	**19.562.249.409**	
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	36	60.000.000	36	80.000.000	36	88.000.000	36	96.800.000	36	106.480.000	
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	48	563.926.360	48	620.318.996	48	650.000.000	48	670.000.000	48	680.000.000	
X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	168	168	92.003.903	168	101.204.293	168	111.324.723	168	122.457.195	168	130.000.000	
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	36	15.676.293.453	36	18.382.509.711	36	18.645.769.409	36	18.645.769.409	36	18.645.769.409	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**1.653.957.266**	**100**	**1.883.915.474**	**100**	**2.072.307.021**	**100**	**1.941.080.030**	**100**	**1.953.135.030**	
X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	43.959.999	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	73.000.000	
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	131	109	1.278.769.910	109	1.278.769.910	109	1.406.646.901	109	1.278.769.910	109	1.278.769.910	
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	150	30	16.143.840	30	30.000.000	30	33.000.000	30	36.300.000	30	39.930.000	
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	520	520	41.223.887	520	60.000.000	520	66.000.000	520	50.000.000	520	55.000.000	

Bidang Urusan/Program/ /Kegiatan /Subkegiatan	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	15	18.394.367	15	25.000.000	15	27.500.000	15	30.250.000	15	33.275.000	
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	6	6	255.465.263	6	430.145.564	6	473.160.120	6	473.160.120	6	473.160.120	

Keterangan :

	Program
	Kegiatan
	Sub Kegiatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57	56,24	57,91	59,57	60,24	61,24	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah dikalikan 100%
2	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	100	100	100	100	100	100	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan 100%

Sumber :
- *Bapenda Kota Semarang Tahun 2025-2029*
- *Bapenda Kota Semarang Tahun 2025-2029*

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57	56,24	57,91	59,57	60,24	61,24	Target Indikator Kinerja Kunci Kota Semarang Tahun 2025-2030 berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029
2	Rasio Pajak terhadap PDRB	%	1,16	1,26	1,36	1,45	1,55	1,65	Target Indikator Kinerja Kunci Kota Semarang Tahun 2025-2030 berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Sumber :
- *RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029*
- *RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029*

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan keuangan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Permasalahan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

33. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan profesional, diperlukan peran strategis dari aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, perencanaan strategis dalam pengelolaan kepegawaian menjadi suatu keharusan agar pembangunan Kepegawaian aparatur dapat terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kota Semarang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen ASN, pengembangan kompetensi, serta pelaksanaan kebijakan kepegawaian daerah memiliki peran penting dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025–2029. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dituntut untuk mampu merespons berbagai dinamika, baik internal maupun eksternal, serta menjawab tantangan-tantangan strategis seperti transformasi digital layanan kepegawaian, implementasi sistem merit, peningkatan kompetensi ASN, serta penguatan nilai-nilai dasar ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025–2029 ini mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025–2045, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra ini disusun untuk memberikan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan operasional, serta program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama lima tahun ke depan. Selain sebagai acuan kerja, dokumen ini juga merupakan bentuk komitmen institusi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, serta penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan kompeten.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dapat memahami arah pengembangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, serta turut berperan aktif dalam pelaksanaannya demi terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan responsif melalui penguatan sumber daya aparatur yang unggul.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 UU 20/2023 disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai: (1) pelaksana kebijakan publik; (2) pelayan publik; dan (3) perekat dan pemersatu bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN tak terkecuali di Kota Semarang.

Sesuai Peraturan Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2025 mempunyai 52 (lima puluh dua) perangkat daerah dengan total Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai dengan 30 April 2025 sebanyak 14.242 ASN yang terdiri dari 8.031 PNS dan 6.211 PPPK. Jumlah ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang bertanggung jawab atas pengelolaan Kepegawaian dalam skala besar dan kompleks, yang menuntut sistem manajemen ASN yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik.

Dengan tantangan pengelolaan ASN yang semakin besar, termasuk peningkatan jumlah PPPK dan kebijakan nasional terkait manajemen talenta, sistem merit, serta digitalisasi layanan kepegawaian, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan perlu menyusun strategi yang komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan. Strategi tersebut diwujudkan melalui Rencana Strategis (Renstra) yang tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal, tetapi juga sebagai arah kebijakan dan transformasi kelembagaan menuju pengelolaan ASN yang lebih efisien, efektif, dan berbasis kinerja.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Serta melalui dokumen Renstra 2025–2029 ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai institusi penopang reformasi birokrasi dan pelayan strategis dalam pengembangan sumber daya aparatur yang unggul dan berdaya saing dalam mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Semarang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045;
12. Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Kepegawaian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang kepegawaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2025 – 2029 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Adapun tujuan disusunnya adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Wali Kota Semarang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan visi dan misi Wali Kota Semarang 2025–2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen strategis selama 5 (lima) tahun sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
5. Mempermudah pengendalian kegiatan setiap pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Semarang terkait dengan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
6. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan kualitas sumber daya aparatur guna menunjang penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Berisi Tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan, Serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis PERANGKAT DAERAH
Berisi Gambaran Struktur Oraganisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Serta Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang. Selain Itu Juga Memuat Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Yang Akan Dihadapi Berdasarkan Evaluasi, Analisis Dan Prediksi Tarhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan
Berisi Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Dan Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Yang Penyusunannya Berpedoman Pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Serta Strategi Dan Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Yang Penyusunannya Berpedoman Pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Bab VI : Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Berisi Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Serta Lokus. Selain Itu Juga Memuat Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Kunci, Yang Disertai Kondisi Awal Kinerja, Dan Kondisi Akhir Kinerja Yang Berhubungan Dengan Indikator Kinerja Daerah Dalam RPJMD.

Bab V : Penutup
Kesimpulan Penting Substansial, Kaidah Pelaksanaan Dan Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembanunan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dibentuk melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang. Sesuai dengan pasal 2 angka (1) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 dinyatakan bahwa "Badan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang merupakan unsur merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan;
e. penyelenggaraan kerja sama Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
f. penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semararan nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
   1) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
   3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas:
   1) Subkoordinator Penetapan dan Pengadaan Pegawai dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   2) Subkoordinator Pemberhentian Pegawai dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   3) Subkoordinator Data dan Informasi Pegawai dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas:
   1) Subkoordinator Jabatan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   2) Subkoordinator Pengembangan Karier dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   3) Subkoordinator Penempatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:
   1) Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   2) Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   3) Subkoordinator Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
   f. Bidang Kesejahteraan dan disiplin, terdiri atas:
   1) Subkoordinator Kepangkatan dan Penghargaan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   2) Subkoordinator Kepangkatan dan Penghargaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   3) Subkoordinator Disiplin dan Kelompok Jabatan Fungsional.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
   h. Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat diuraikan sbb :

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin. Sekretaris juga diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
d. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Badan;
g. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Badan;
h. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
j. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Badan;
m. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;
n. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan;
p. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan;
q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan;
r. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan;

s. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan;
t. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan;
u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
v. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan;
w. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan;
x. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan;
y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
z. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkup sekretariat, Sekretariat, terdiri dari :
a. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator dan Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. *Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi*

   Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
   e. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Badan;
   f. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
   g. menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
   h. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;

i. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
j. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
k. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
l. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. *Sub Bagian Keuangan*

Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
f. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
g. menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Badan;
h. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;
i. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
j. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Badan;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
l. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

e. menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan;
g. menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan;
h. menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan;
i.

C. Bidang Administrasi Kepegawaian

Bidang Administrasi Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Administrasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Penetapan dan Pengadaan Pegawai, Pemberhentian Pegawai, dan Data dan Informasi Pegawai. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
c. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Administrasi Kepegawaian;
d. pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Pengadaan Pegawai, Pemberhentian Pegawai, dan Data dan Informasi Pegawai;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan formasi kepegawaian;
f. menyiapkan kegiatan penyusunan bezetting ASN;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan peta jabatan pegawai ASN;
h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan seleksi calon pegawai ASN, usul penetapan NIP dan pengangkatan calon pegawai;
i. menyiapkan kegiatan penetapan dan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
j. menyiapkan kegiatan pengendalian Pegawai non ASN;
k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengolahan data e-Formasi;
l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS;
m. menyiapkan kegiatan penyediaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian sesuai kewenangan daerah;
n. menyiapkan kegiatan penyediaan data dan informasi kepegawaian;
o. menyiapkan kegiatan pemutakhiran data ASN;
p. menyiapkan kegiatan pembuatan Kartu Pegawai, Karis/Karsu, KPE, tanda pengenal;

q. menyiapkan kegiatan pengelolaan arsip kepegawaian;
r. menyiapkan kegiatan proses Kenaikan Gaji Berkala;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian status kepegawaian;
t. menyiapkan kegiatan pemutakhiran data ASN;
u. menyiapkan kegiatan pembuatan Kartu Pegawai, Karis/Karsu, KPE, tanda pengenal;
v. menyiapkan kegiatan pengelolaan arsip kepegawaian;
w. menyiapkan kegiatan proses Kenaikan Gaji Berkala;
x. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian status kepegawaian;
y. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Administrasi Kepegawaian;
z. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Administrasi Kepegawaian;
å. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian; dan
ä. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkup Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas :
a. Subkoordinator Penetapan dan Pengadaan Pegawai;
b. Subkoordinator Pemberhentian Pegawai; dan
c. Subkoordinator Data dan Informasi Pegawai.

Masing-masing Sub Koordinator tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian.

1. *Sub Koordinator Penetapan dan Pengadaan Pegawai*
   Sub Koordinator Penetapan dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penetapan dan Pengadaan Pegawai;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Penetapan dan Pengadaan Pegawai;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan formasi kepegawaian;
   f. menyiapkan kegiatan penyusunan bezetting ASN;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan peta jabatan pegawai ASN;
   h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan seleksi calon pegawai ASN, usul penetapan NIP dan pengangkatan calon pegawai;
   i. menyiapkan kegiatan penetapan dan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
   j. menyiapkan kegiatan pengendalian Pegawai non ASN;

k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengolahan data e-Formasi;
l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Penetapan dan Pengadaan Pegawai;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Penetapan dan Pengadaan Pegawai;
o. menyiapkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
p. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Pengadaan Pegawai;
q. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. *Sub Koordinator Data dan Informasi Pegawai*
Sub Koordinator Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Data dan Informasi Pegawai;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Data dan Informasi Pegawai;
e. menyiapkan kegiatan penyediaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian sesuai kewenangan daerah;
f. menyiapkan kegiatan penyediaan data dan informasi kepegawaian;
g. menyiapkan kegiatan pemutakhiran data ASN;
h. menyiapkan kegiatan pembuatan Kartu Pegawai, Karis/Karsu, KPE, tanda pengenal;menyiapkan kegiatan pengelolaan arsip kepegawaian;
i. menyiapkan kegiatan proses kenaikan gaji berkala;
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian status kepegawaian;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Data dan Informasi Pegawai;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Data dan Informasi Pegawai;
m. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi Pegawai;
n. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. *Sub Koordinator Pemberhentian Pegawai*
   Sub Koordinator Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemberhentian Pegawai Pegawai;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pemberhentian Pegawai;
e. menyiapkan kegiatan proses pemberhentian ASN atas pemintaan sendiri;
f. menyiapkan kegiatan proses pemberhentian ASN karena mencapai Batas Usia Pensiun;
g. menyiapkan kegiatan proses pemberhentian ASN karena meninggal dunia;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi permohonan taspen bagi ASN yang purna tugas;
i. menyiapkan kegiatan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan organik dan pengaktifan kembali;
j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembekalan ASN yang akan purna tugas;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pemberhentian Pegawai;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pemberhentian Pegawai;
m. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemberhentian Pegawai;
n. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pengembangan Pegawai

Bidang Pengembangan Pegawai berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, Bidang Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Jabatan, Pengembangan Karier dan Penempatan. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi:

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pengembangan Pegawai;
e. pelaksanaan kegiatan konsultasi pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas;
f. pelaksanaan kegiatan penetapan, pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas;
g. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi;
h. pelaksanaan kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim penilai kinerja pegawai;
j. pelaksanaan kegiatan Ujian Badan;
k. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Surat Ijin Belajar, Surat Ijin Penggunaan Gelar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar, Surat Keterangan Belajar dan Tugas Belajar;
l. pelaksanaan kegiatan penilaian prestasi kerja pegawai;
m. pelaksanaan kegiatan mutasi PNS masuk ke Pemerintah Kota Semarang dan keluar dari Pemerintah Kota Semarang;
n. pelaksanaan kegiatan penempatan bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
o. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pengembangan Pegawai;
p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pengembangan Pegawai;
q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Pegawai; dan
r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkup Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas :
a. Subkoordinator Jabatan;
b. Subkoordinator Pengembangan Karier; dan
c. Subkoordinator Penempatan.

Masing-masing Sub Koordinator tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pegawai.

1. *Sub Koordinator Jabatan*, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan Jabatan;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Jabatan;

e. menyiapkan kegiatan konsultasi pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas;
f. menyiapkan kegiatan penetapan, pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas;
g. menyiapkan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi;
h. menyiapkan kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
i. menyiapkan fasilitasi kegiatan tim penilai kinerja pegawai;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan Indeks profesionalitas pegawai;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pola karier pegawai;
l. menyiapkan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas kepala perangkat daerah;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi kegiatan Jabatan;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan kegiatan Jabatan;
o. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jabatan;
p. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. *Sub Koordinator Pengembangan Karier*, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Karier;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengembangan Karier;
   e. menyiapkan kegiatan Ujian Dinas;
   f. menyiapkan kegiatan pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, surat ijin belajar, surat ijin penggunaan gelar, surat keterangan penggunaan gelar, surat keterangan belajar dan tugas belajar;
   g. menyiapkan kegiatan penilaian prestasi kerja pegawai;
   h. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengembangan Karier;
   i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengembangan Karier;
   j. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Karier;
   k. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. *Sub Koordinator Penempatan*, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Penempatan;
   e. menyiapkan kegiatan mutasi PNS masuk ke Pemerintah Kota Semarang dan keluar dari Pemerintah Kota Semarang; f. menyiapkan kegiatan penempatan bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
   f. menyiapkan kegiatan pengusulan, penetapan, pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian jabatan fungsional;
   g. menyiapkan kegiatan perubahan nama jabatan pelaksana;
   h. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Penempatan;
   i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Penempatan;
   j. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penempatan;
   k. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

   a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
   e. pelaksanaan kegiatan penyusunan calon peserta Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional;
   f. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengiriman Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional;

g. pelaksanaan kegiatan penyusunan daftar alumni Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional;
h. pelaksanaan kegiatan penyusunan calon peserta Pendidikan dan Pelatihan prajabatan dan Kepemimpinan;
i. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengiriman Pendidikan dan Pelatihan prajabatan dan Kepemimpinan;
j. pelaksanaan kegiatan penyusunan daftar alumni Pendidikan dan Pelatihan prajabatan dan Kepemimpinan;
k. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan analisa kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan;
l. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyusunan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;
m. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengendalian mutu Pendidikan dan Pelatihan;
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
o. pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan;
p. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkup Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:
a. Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
b. Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
c. Subkoordinator Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Masing-masing Sub Koordinator tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pegawai.

1. Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan calon peserta Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional;

f. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan dan pengiriman Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan daftar alumni Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
j. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
k. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
   f. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan daftar alumni Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
   h. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
   i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
   j. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
   k. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;

b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan analisa kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan;
f. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyusunan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;
g. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengendalian mutu Pendidikan dan Pelatihan;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
i. menyiapkan kegiatan evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
l. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
m. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Kepangkatan dan Penghargaan, Kesejahteraan, dan Disiplin.

Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
e. menyiapkan kegiatan usulan dan penetapan keputusan kenaikan pangkat bagi ASN;
f. menyiapkan kegiatan pemberian penghargaan pegawai;
g. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan pembinaan jasmani dan mental ASN;

h. menyiapkan kegiatan uji kesehatan ASN;
i. menyiapkan kegiatan pemberian dispensasi bagi pegawai ASN;
j. menyiapkan kegiatan pelayanan konseling;
k. menyiapkan kegiatan fasilitasi proses permohonan dana taperum dan asuransi;
l. menyiapkan kegiatan pelayanan cuti ASN;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian tunjangan kinerja pegawai;
n. menyiapkan kegiatan verifikasi tunjangan kinerja pegawai;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Disiplin;
p. menyiapkan kegiatan penanganan penjatuhan hukuman disiplin;
q. menyiapkan kegiatan pengusulan dan/atau penetapan pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dari jabatan negeri;
r. menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi pembinaan disiplin pegawai;
s. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai;
t. menyiapkan kegiatan pembekalan peningkatan disiplin pegawai;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan LHKPN dan LHKASN;
v. menyiapkan kegiatan pembinaan kode etik dan perilaku pegawai;
w. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
x. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur; dan
z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkupBidang Kesejahteraan dan Disiplin, terdiri atas:
a. Subkoordinator Kepangkatan dan Penghargaan;
b. Subkoordinator Kesejahteraan; dan
c. Subkoordinator Disiplin.

Masing-masing Sub Koordinator tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin.
1. Sub Koordinator Kepangkatan dan Penghargaan mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kepangkatan dan Penghargaan;
    b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kepangkatan dan Penghargaan;
e. menyiapkan kegiatan usulan dan penetapan keputusan kenaikan pangkat bagi ASN;
f. menyiapkan kegiatan pemberian penghargaan pegawai;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Kepangkatan dan Penghargaan;
h. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Kepangkatan dan Penghargaan;
i. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kepangkatan dan Penghargaan;
j. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Kesejahteraan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kesejahteraan;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kesejahteraan;
e. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan pembinaan jasmani dan mental ASN;
f. menyiapkan kegiatan uji kesehatan ASN;
g. menyiapkan kegiatan pemberian dispensasi bagi pegawai ASN;
h. menyiapkan kegiatan pelayanan konseling;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi proses permohonan dana taperum dan asuransi;
j. menyiapkan kegiatan pelayanan cuti ASN;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian tunjangan kinerja pegawai;
l. menyiapkan kegiatan verifikasi tunjangan kinerja pegawai;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Kesejahteraan;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Kesejahteraan;
o. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan;
p. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Disiplin mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Disiplin;
   b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Disiplin;
   e. menyiapkan kegiatan penanganan penjatuhan hukuman disiplin;
   f. menyiapkan kegiatan pengusulan dan/atau penetapan pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dari jabatan negeri;
   g. menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi pembinaan disiplin pegawai;
   h. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai;
   i. menyiapkan kegiatan pembekalan peningkatan disiplin pegawai;
   j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan LHKPN dan LHKASN;
   k. menyiapkan kegiatan pembinaan kode etik dan perilaku pegawai;
   l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Disiplin;
   m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Disiplin;
   n. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Disiplin;
   o. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
   p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

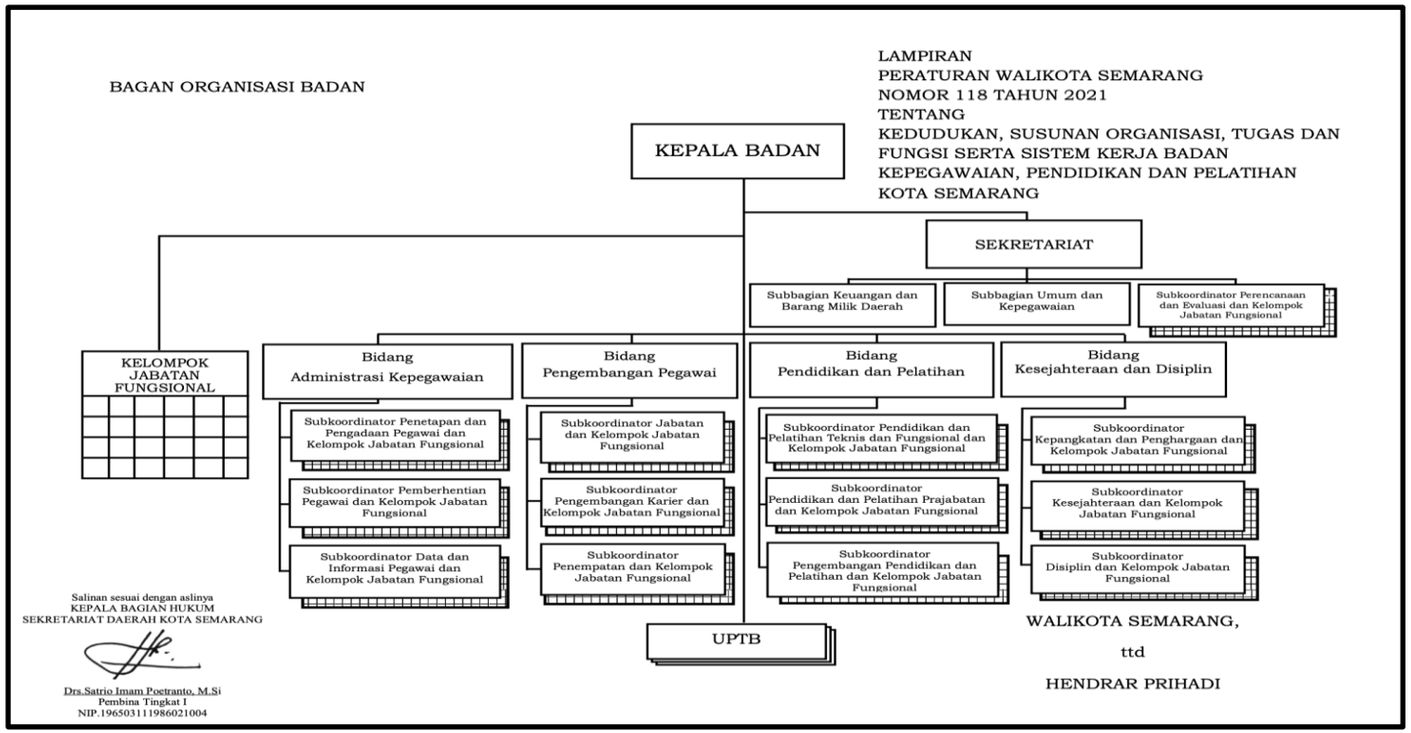

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

B. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

2.1.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Kepegawaian

Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam katergori PNS dan PPPK. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	2	1	-	1	4
2	D3	4	10	-	-	14
3	S1/ D4	14	26	6	1	47
4	S2	6	4	-	-	10

Dari jumlah pegawai sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	8	11
2	Golongan III	21	25	46
3	Golongan IV	4	5	9
4	Golongan IX	7	-	7
5	Golongan V	-	1	1

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	1	1	2
4	Jabatan Fungsional	17	23	40
5	Jabatan Pelaksana	12	14	26

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berasal dari APBD dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Aset Tanah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m^2)	Tahun Pengadaan	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga
				Hak	Sertifikat				
					Tanggal	Nomor			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.734	2016	Hak Pakai	-	-	Bangunan Gedung BKPP Kota Semarang	Tanah Pemerintah Kota Semarang	9.748.500.275

Tabel 2.5
Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (m^2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah (m2)	Asal Usul
1	Gedung Bagunan Balai Diklat	B	3.468	Jl. Fatmawati No. 73 A A Semarang	7.774,78	1.734	Tanah Pemerintah Kota Semarang

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Dalam upaya pelaksanaan tugas tugas guna menjaga dan meningkatkan Kepegawaian, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki menjaga keutuhan wilayah melalui penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama periode waktu 2021-2024 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang bidang urusan Kepegawaian terbagi menjadi capaian kinerja urusan kepegawaian yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Taget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisai Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
I	**Indikator Tujuan**																		
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	-	-	N/A	N/A	0,65	0.68	0,73	N/A	N/A	0,66	0,73	0,76	N/A	N/A	101,53%	107,35%	104,10%
II	**Indikator Sasaran**																		
1	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian	Nilai	-	-	N/A	N/A	80,60	80,90	81,20	N/A	N/A	91,88	91,11	92,00	N/A	N/A	113,99%	112,62%	113,30%
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	-	N/A	N/A	82,50	83,00	83,50	N/A	N/A	51,23	85,40	85,99	N/A	N/A	62,09%	102,89%	102,98%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BKPP	Nilai	-	-	N/A	N/A	78,21	79.30	80,10	N/A	N/A	78,21	79,70	80,60	N/A	N/A	100%	113,37%	100,62%
4	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Rupiah	-	-	N/A	N/A	44.000000	50.000.000	78.930.000	N/A	N/A	63.650.000	85.900.000	191.350.000	N/A	N/A	144,65%	171,80%	242,43%
III	**Indikator Program**																		
1	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan BKPP yang berkualitas	Persentase	-	-	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Presentase	-	-	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Taget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisai Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase	-	-	N/A	N/A	35,00%	40,00%	45,00 %	N/A	N/A	41,00%	55,00%	76,00 %	N/A	N/A	117,14%	137,50 %	168,88%
IV	**Indikator Kinerja Kunci**																		
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	N/A	N/A	225,7 %	239,43 %	258,36 %	N/A	N/A	342,57 %	395,72%	522,37%	N/A	N/A	151,79 %	165,27 %	202,18 %
2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	N/A	N/A	17,53 %	19,19 %	20,98 %	N/A	N/A	19,22%	14,07%	21,70 %	N/A	N/A	109,64%	73,31%	103,43%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	N/A	N/A	100.00 %	100.00 %	100.00 %	N/A	N/A	39,00%	65,41%	100%	N/A	N/A	39,00%	65,41 %	100 %

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	18.375.007.936	16.398.547.885	18.616.128.857	16.736.572.855	N/A	16.595.019.983	15.770.745.954	17.915.465.125	16.263.681.996	N/A	90,31%	96,17%	96,24%	97,17%	-2,44%	-0,20%
Program Kepegawaian Daerah	N/A	9.347.008.741	8.741.975.338	9.747.153.592	8.050.207.503	N/A	7.169.570.986	6.368.706.629	8.081.506.182	7.228.821.370	N/A	76,70%	72,85%	82,91%	89,80%	-4,13%	1,72%
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	N/A	7.149.978.087	6.793.205.395	7.785.134.560	6.286.861.330	N/A	6.720.240.509	6.522.949.902	7.202.032.781	5.853.425.386	N/A	93,99%	96,02%	92,51%	93,11%	-3,21%	-3,75%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	N/A	N/A	44.000.000	72.400.000	100.000.000	N/A	N/A	63.650.000	85.900.000	191.350.000	N/A	N/A	144,66%	118,65%	191,35%	51,33%	78,86%

c. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang, diperlukan kolaborasi dengan berbagai Perangkat Daerah mitra. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memastikan layanan kepegawaian berjalan efektif, terintegrasi, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Adapun mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan antara lain :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang
   a.) Sebagai pengguna layanan kepegawaian (mutasi, promosi, kenaikan pangkat, disiplin, kinerja, TPP, cuti, pensiun).
   b.) Memberikan data dukung kepegawaian dan melaksanakan koordinasi administratif.
2. Inspektorat Kota Semarang
   a.) Mendukung aspek pengawasan internal, pengendalian gratifikasi, integritas, serta pembinaan SPIP terkait manajemen ASN.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang
   a.) Sinkronisasi program/kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, Renja).
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
   a.) Koordinasi terkait belanja pegawai, TPP, gaji, serta dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN.
5. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
   a.) Mitra strategis dalam pengembangan kompetensi ASN melalui LMS *Sip Tenan* dan program pendidikan/pelatihan.

d. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, baik antar Perangkat Daerah, antar daerah, pemerintah provinsi maupun pusat, serta lembaga swasta/BUMN/BUMD. Kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas manajemen ASN, integrasi sistem informasi, serta peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

Adapun bentuk kerja sama yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang meliputi:

1. Kerja Sama Antar Daerah
   a) Pertukaran praktik baik (best practice) manajemen ASN dengan BKD/ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.
   b) Forum koordinasi kepegawaian regional yang difasilitasi BKN Kantor Regional I Yogyakarta.
2. Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
   a) Kolaborasi dengan BPSDMD Provinsi Jateng dalam pengembangan kompetensi ASN melalui LMS *Sip Tenan*, diklat, dan PKN.
   b) Sinkronisasi data kepegawaian melalui aplikasi provinsi.
3. Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat/Nasional
   a) BKN RI & Kantor Regional yaitu integrasi SIMPATIK daerah dengan SIASN.

b) LAN RI yaitu penyelenggaraan diklat, PKN, serta pendampingan inovasi proyek perubahan.
c) KPK & UPG Nasional yaitu kerja sama pencegahan gratifikasi dan penguatan integritas ASN.

4. Kerja Sama dengan BUMN/BUMD dan Swasta
a) PT Taspen (Persero) yaitu penyelenggaraan hak pensiun ASN.
b) BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan yaitu perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan ASN/PPPK.
c) Bank Jateng yaitu fasilitasi pembayaran gaji, TPP, dan kredit ASN.

e. Inovasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah mengembangkan sejumlah inovasi yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas manajemen ASN. Beberapa inovasi yang telah diterapkan pada periode sebelumnya antara lain:

1. E-Kinerja & E-TPP
a) Sistem penilaian kinerja ASN berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pembayaran TPP.
b) Dampak: mendorong budaya kinerja, transparansi, dan keterkaitan langsung antara kinerja dengan reward.

2. Mata Si Intel (Manajemen Talenta ASN Berbasis AI)
a) Aplikasi untuk pemetaan talenta ASN berbasis data dan kecerdasan buatan.
b) Dampak: mendukung penerapan sistem merit dalam mutasi, promosi, dan pengembangan karier.

3. E-Disiplin & E-Perilaku 360
a) Aplikasi pengawasan disiplin ASN dan penilaian perilaku berbasis multi-sumber (360 derajat).
b) Dampak: memperkuat budaya kerja, transparansi, dan pembinaan integritas ASN.

4. E-Bangkom (Pengembangan Kompetensi ASN Digital)
a) Platform pengelolaan program pendidikan dan pelatihan ASN.
b) Dampak: mempermudah perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi diklat secara elektronik.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dengan membaca tantangan dan peluang tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, meningkatkan kapasitas ASN, serta menjaga integritas birokrasi. Visi besar yang ingin dicapai adalah terwujudnya layanan kepegawaian yang modern, profesional, dan terpercaya, sehingga mendukung agenda pembangunan Kota Semarang dalam lima tahun mendatang.

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Transformasi Digital Layanan Kepegawaian
a) Belum seluruh sistem/aplikasi kepegawaian terintegrasi penuh (end-to-end).

b) Risiko duplikasi data dan input manual masih terjadi di beberapa OPD.
c) Tantangan menjaga keamanan data ASN sesuai standar BSSN.

2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas ASN
   a) Masih adanya gap kompetensi ASN, terutama di bidang teknologi informasi, perencanaan, dan analisis kebijakan.
   b) Kebutuhan peningkatan kompetensi yang lebih adaptif terhadap tuntutan era digital, smart city, dan pelayanan publik prima.
3. Penerapan Sistem Merit yang Konsisten
   a) Tantangan dalam memastikan mutasi, promosi, dan pengisian jabatan sesuai prinsip merit, bebas intervensi, dan berbasis talenta.
   b) Masih perlunya penguatan budaya kinerja dan integritas ASN.
4. Kesejahteraan dan Motivasi ASN
   a) Dinamika terkait kebijakan TPP, pensiun ASN, dan kesejahteraan pegawai yang memerlukan inovasi pembiayaan dan pengelolaan.
   b) Potensi munculnya ketidakpuasan jika distribusi reward belum sepenuhnya berbasis kinerja.
5. Penguatan Akuntabilitas & Zona Integritas
   a) Tantangan dalam mempertahankan predikat WBK/WBBM.
   b) Risiko gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pelayanan kepegawaian.
6. Dinamika Regulasi Nasional dan Daerah
   a) Adanya regulasi baru (UU ASN 2023, peraturan turunan tentang manajemen PPPK, sistem merit, SPBE) yang menuntut adaptasi cepat.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang adalah :

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Nasional
   a) UU ASN 2023, SPBE, serta Roadmap Reformasi Birokrasi memberikan payung hukum yang kuat untuk transformasi digital manajemen ASN.
2. Pemanfaatan Teknologi Digital & Big Data
   a) Integrasi sistem melalui pemetaan talenta ASN berbasis AI (Mata Si Intel) membuka peluang efisiensi 20–25%
3. Kolaborasi Multipihak
   a) Sinergi dengan BKN, LAN RI, BPSDMD Jateng, KPK, BSSN, Taspen, BPJS, dan Bank Jateng memperluas cakupan layanan ASN.
   b) Dukungan perguruan tinggi dan sektor swasta untuk pengembangan kompetensi ASN.
4. Dukungan Kepemimpinan Daerah
   a) Komitmen Wali Kota Semarang dalam mewujudkan birokrasi modern, smart city, serta peningkatan nilai IP ASN & Sistem Merit menjadi peluang percepatan inovasi.
5. Peningkatan Kesejahteraan ASN
   a) Peluang optimalisasi kerjasama dengan lembaga keuangan dan BUMN/BUMD untuk akses pembiayaan, tabungan pensiun, maupun program kesejahteraan ASN.
6. Kesadaran ASN terhadap Integritas dan Profesionalisme

a) Meningkatnya budaya pelaporan gratifikasi dan kepatuhan disiplin ASN menjadi modal sosial dalam mewujudkan layanan kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yaitu: “Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel akibat belum optimalnya Manajemen ASN” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Rumusan Permasalahan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

No.	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum Optimalnya Pengelolaan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN yang dilaksanakan secara tertib dan berbasis sistem informasi yang terintegrasi	a) Penyusunan rencana kebutuhan jabatan serta koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN belum terlaksana secara optimal sesuai kebutuhan organisasi b) Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN belum berjalan efektif dan tepat waktu c) Pengelolaan sistem informasi dan data kepegawaian belum berjalan secara terintegrasi dan akurat.
2	Mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan organisasi secara terencana dan berkelanjutan	a) Pengelolaan mutasi ASN belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya mendukung penataan pegawai yang sesuai kebutuhan organisasi b) Pengelolaan kenaikan pangkat, pendidikan lanjutan, dan pengembangan karir jabatan fungsional ASN belum berjalan optimal dan terintegrasi c) Pengelolaan promosi dan pembinaan jabatan fungsional ASN belum berjalan optimal sesuai dengan sistem merit
3	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan capaian kinerja yang objektif	a) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur belum berjalan secara objektif dan berkesinambungan b) Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai belum dilaksanakan secara objektif dan terstruktur c) Pembinaan disiplin, penyelesaian pelanggaran, dan pelayanan izin perceraian ASN belum terlaksana secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku
4	Pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, sertifikasi, dan penguatan kelembagaan belum berjalan optimal dan terintegrasi	a) Penyusunan kebijakan teknis dan standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi teknis bagi Jabatan Administrasi belum terlaksana secara menyeluruh dan terintegrasi sesuai kebutuhan urusan pemerintahan b) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi belum terlaksana secara terkoordinasi, terpantau, dan terlaporkan secara optimal c) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan belum terlaksana secara merata dan terencana

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJM 2025-2029

Dalam penelaahan isu pada dokumen RPJMN 2025-2029 pada Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN
   RPJMN menekankan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, termasuk identifikasi talenta, pengembangan kompetensi, dan penempatan ASN berdasarkan kompetensi. Hal ini menjadi fondasi utama reformasi birokrasi ke depan.
2) Transformasi Digital Manajemen ASN
   Digitalisasi manajemen kepegawaian menjadi prioritas, mencakup interoperabilitas sistem informasi ASN, penggunaan analitik HR (HR analytics), dan percepatan digitalisasi proses kepegawaian secara menyeluruh.
3) Institusional Governance dan Reformasi Internal BKN
   Badan Kepegawaian Negara (BKN) diarahkan untuk memperkuat lembaga melalui organisasi yang lincah, digital, profesional, dan akuntabel. RPJMN menuntut transformasi kelembagaan BKN untuk mendukung sistem manajemen ASN holistic.
4) Koordinasi Kelembagaan dan Pendampingan Teknis
   BKN berkolaborasi dengan KemenPANRB dan LAN untuk menyinkronkan kebijakan kepegawaian dan mendampingi penerapan sistem merit hingga area regional dan daerah
5) Implementasi Digital & Reformasi Tata Kelola
   Tiga sasaran strategis yang diusung oleh KemenPANRB terkait pelaksanaan RPJMN di bidang kepegawaian adalah:
   a) Penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit
   b) Percepatan transformasi digital pemerintahan
   c) Kepatuhan terhadap rekomendasi OECD terkait manajemen publik

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum,

hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Kepegawaian, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah “Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi, Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan, Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan, Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan sistem merit, Pengembangan kota cerdas untuk pengelolaan kota berbasis data.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dalam mencapai sasaran ““Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi, Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan, Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan, Peningkatan kualitas SDM”, melalui indkator “Peningkatan Indeks Sistem Merit dan IP ASN”.

c. Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negera

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan Visi yaitu Terwujudnya *Meritokrasi* dan *Profesionalitas* ASN dalam rangka mendukung visi Presiden, menuju “Indonesia Emas 2045”. Secara umum, arah kebijakan nasional bidang kepegawaian dalam Renstra Badan Kepegawaian Negara 2025–2029 difokuskan pada:

1. Meningkatkan kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas ASN berbasis prinsip meritokrasi.
2. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, akuntabel, serta berbasis digital. Dokumen menjadikan kedua sasaran tersebut sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan strategis: *“Meningkatnya kualitas ASN dan kapasitas manajemen ASN berbasis pendekatan human capital management.”*

Selain itu terdapat Arah Kebijakan dan Fokus Pendukung pada resntra BKN tahun 2025-2029 adalah :

a. Transformasi digital dan penguatan merit menjadi arus utama dalam strategi BKN 2025–2029, sejalan dengan kebutuhan pemerintah modern dan terintegrasi.
b. Human Capital Management menjadi pendekatan dasar: tidak hanya mengelola ASN, tetapi menumbuhkan profesionalitas, kapabilitas kelembagaan, serta tata kelola yang responsif dan berbasis

d. Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah

1. Telaah Renstra Badan Kepegawaian Negara Provinsi Jawa Tengah

   Landasan dan Keterkaitan Visi Gubernur Jawa Tengah yiatu *"Menuju Jawa Tengah yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Dalam hal tersebt* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian visi tersebut melalui penguatan tata kelola ASN, penerapan sistem merit, dan transformasi layanan kepegawaian berbasis digital. BKD Provinsi Jawa Tengah juga terdapat isu strategis dalam hal menunjang visi dan misi Gubenur Jawa Tengah yaitu :

   a.) Belum optimalnya penerapan Sistem Merit.
   b.) Profesionalitas ASN masih bervariasi, ada gap kompetensi.
   c.) Digitalisasi kepegawaian belum terintegrasi penuh dengan SIASN.
   d.) Disiplin dan kinerja ASN masih menghadapi kendala.
   e.) Data ASN belum sepenuhnya valid, mutakhir, dan terintegrasi.
   f.) Tantangan Reformasi Birokrasi dan pencapaian Zona Integritas.

   Tujuan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah :

   a.) Mewujudkan manajemen ASN berbasis merit dan bebas konflik kepentingan.
   b.) Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian berbasis digital dan transparan.
   c.) Mendorong profesionalitas, kinerja, dan etika ASN.
   d.) Mengembangkan manajemen talenta ASN untuk regenerasi kepemimpinan.
   e.) Menyediakan basis data ASN terintegrasi yang akurat.
   f.) Mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.

   Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

   a.) Penguatan regulasi & SOP kepegawaian berbasis transparansi.
   b.) Percepatan transformasi digital (integrasi SIASN, SIMPEG, e-Kinerja, e-Disiplin).
   c.) Implementasi manajemen talenta untuk pengisian JPT.
   d.) Peningkatan disiplin ASN melalui reward and punishment.
   e.) Penguatan integritas & anti-gratifikasi untuk mendukung WBK/WBBM.
   f.) Kolaborasi dengan BKN, KASN, LAN, BPSDM dalam pengembangan ASN.

   Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

   a.) Manajemen ASN yaitu rekrutmen, promosi, mutasi berbasis merit.

b.) Digitalisasi Layanan: pengembangan SIMPEG terintegrasi, layanan kepegawaian online.
c.) Data ASN yaitupemutakhiran data, integrasi dengan SIASN & BKN.
d.) Reformasi Birokrasi yaitu peningkatan nilai SAKIP, RB, dan penguatan zona integritas.

Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah berfokus pada penguatan manajemen ASN berbasis merit**,** digitalisasi layanan, profesionalisme dan integritas ASN**,** serta dukungan pada reformasi birokrasi**.** Dengan target Indeks Sistem Merit "Baik", IP ASN meningkat, dan layanan kepegawaian digital yang terintegrasi, BKD menjadi motor penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berdaya saing di Jawa Tengah.

2. **Telaah Renstra Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah**

a.) Posisi & Mandat BPSDMD dalam RPJMD

Peran strategis BPSDMD adalah menyiapkan ASN yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan digital-ready untuk mengakselerasi target RPJMD. Keterkaitan langsung dengan misi pemerintah provinsi adalah SDM berdaya saing kurikulum pelatihan kepemimpinan/teknis berorientasi outcome layanan public, Pertumbuhan berbasis inovasi inkubasi inovasi pelayanan & project-based learning pada OPD, Tata kelola responsif & berintegritas pengarusutamaan RB, SPBE, anti-gratifikasi & SPIP pada kurikulum wajib aparatur.

b.) Program Prioritas BPSDMD (portofolio 2025–2029)

1. Kepemimpinan & Manajemen Perubahan: PKA/PKP/PKP2, coaching-mentoring, project perubahan lintas OPD.
2. Teknis Fungsional Prioritas keuangan daerah, PBJ, perizinan, pengawasan internal, penataan ruang/lingkungan, statistik & data.
3. SPBE & Government Tech Skills data analytics dasar, keamanan informasi, arsitektur proses layanan, otomasi administrasi.
4. Integrity Academy anti-gratifikasi, benturan kepentingan, pelaporan LHKPN/Whistleblowing, SPIP praktis.
5. Inovasi & Layanan Publik design thinking, service blueprinting, pengukuran IKP/IKM.
6. Talenta & Suksesi assessment center, individual development plan (IDP) berbasis talent review, link-and-match dengan BKD.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur struktur ruang, pola ruang, dan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Semarang dalam jangka panjang. RTRW memuat kebijakan dan strategi penataan ruang yang menjadi acuan bagi perangkat daerah yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang, pembangunan fisik, dan pengendalian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan hasil telaahan, substansi RTRW Kota Semarang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025–2029. Hal ini dikarenakan RTRW lebih berfokus pada pengaturan tata ruang dan penetapan zonasi wilayah, sementara tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berada pada bidang pelayanan kepegawaian yang tidak secara eksplisit diatur dalam RTRW.

Meskipun demikian, keberadaan RTRW tetap menjadi salah satu acuan umum dalam pelaksanaan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, khususnya dalam konteks penyesuaian lokasi layanan atau kegiatan pelatihan kerja agar tidak bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Semarang, tidak ditemukan keterkaitan langsung antara arah kebijakan, program, maupun isu strategis yang termuat dalam KLHS dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025–2029. Hal ini disebabkan fokus KLHS yang lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam, sedangkan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berfokus pada peningkatan kualitas, penempatan, dan perlindungan Kepegawaian. Dengan demikian, tidak ada penyesuaian atau integrasi kebijakan yang diperlukan secara langsung dari KLHS ke dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang periode ini. Akan tetapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tetap melakukan telaah tersendiri mengenai Kepegawaian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang manajemen kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan ASN, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki peran penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Melalui transformasi digital layanan kepegawaian, peningkatan kapasitas ASN, dan penguatan sistem merit, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait efisiensi energi, pengurangan penggunaan kertas (*paperless office*), tata kelola pemerintahan yang bersih, serta inklusivitas layanan kepegawaian.

Meskipun tidak berfokus pada pengelolaan lingkungan fisik, tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki dampak tidak langsung pada aspek lingkungan melalui:

1. Digitalisasi Layanan Kepegawaian (Paperless Office) yaitu mengurangi penggunaan kertas, arsip fisik, dan energi penyimpanan manual.
2. Efisiensi Mobilitas ASN yaitu layanan berbasis daring mengurangi perjalanan dinas yang menghasilkan emisi karbon.
3. Peningkatan Kapasitas ASN di Bidang Green Economy dan SDGs dengan pelatihan ASN diarahkan agar mendukung kebijakan ramah lingkungan, ekonomi hijau, dan inklusi sosial.
4. Inklusivitas (GEDSI) yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial.
5. Integritas dan Tata Kelola dengna cara penguatan SPIP, anti gratifikasi, dan transparansi kepegawaian memperkuat good governance yang sejalan dengan prinsip KLHS.

Selain itu terkait dengan Isu KLHS yang Relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam penarapan kajian lingkungan hidup strategis terdiri dari :

1. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam administrasi ASN.
2. Efisiensi penggunaan sumber daya (kertas, energi, waktu kerja).
3. Penerapan literasi ASN untuk pembangunan hijau (green HRM).
4. Penyesuaian diklat ASN dengan agenda pembangunan rendah karbon.
5. Penguatan akses inklusif layanan kepegawaian bagi semua (gender, disabilitas, inklusi sosial).

Dalam pendalaman secara implikasi terhadap sektor strategis lingkungan hidup, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

1. Perencanaan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan perlu mengintegrasikan prinsip efisiensi sumber daya, tata kelola ramah lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Pengembangan Kompetensi ASN diarahkan tidak hanya pada teknis dan manajerial, tetapi juga pada *green leadership* dan digital mindset.
3. Transformasi digital kepegawaian (seperti AUTO SIMPATIK) harus memastikan prinsip paperless, hemat energi, dan ramah lingkungan.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI, Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Isu Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target/ Isu			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1) Tersedianya sistem informasi kepegawaian 2) Kewenangan pembinaan, mutasi, promosi, disiplin, dan pengembangan karier ASN 3) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN	1) Belum Optimalnya Pengelolaan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN yang dilaksanakan secara tertib dan berbasis sistem informasi yang terintegrasi 2) Mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan organisasi secara terencana dan berkelanjutan 3) Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan capaian kinerja yang objektif 4) Pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, sertifikasi, dan penguatan kelembagaan belum berjalan optimal dan terintegrasi	-	2) Transformasi digital dan Society 5.0 menuntut layanan ASN yang otomatis dan paperless 3) Tuntutan profesionalisme ASN di era kompetisi global 4) Good Governance dan SDGs	1) Target peningkatan Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN 2) Peningkatan kualitas SAKIP, IP ASN, dan akuntabilitas 3) Reformasi birokrasi tematik (RB berdampak) fokus SDM	1) Jawa Tengah sebagai role model Merit System dan digitalisasi ASN 2) Peningkatan capaian IP ASN dan Merit System di Jawa Tengah 3) Target peningkatan kualitas data ASN di tingkat provinsi/kota	Penerapan Sistem Merit yang belum optimal di Pemerintah Kota Semarang

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBAJIKAN

3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

3.1.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Kepegawaian. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya manajemen ASN dengan mengoptimalkan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan berbasis pada kualifikasi, kompetensi, serta kebutuhan jabatan yang terstruktur dan berbasis data.”

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Meningkatnya Kualitas pelayanan Kepada masyarakat											
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat										
			Indeks Sistem Merit	Angka	0,79	0,82	0,84	0,87	0,89	0,91	Jumlah Skor Aspek + Bobot Aspek / Total Bobot
		Meningkatnya profesionalitas Kepegawaian ASN									
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka	85	85,62	86,24	87	87,8	88,7	IP ASN=(0,30×Nilai Kualifikasi)+ (0,30×Nilai Kompetensi)+ (0,40×Nilai Kinerja)
		Meningkatnya Kualitas kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan									
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kepegawaian		81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pendidikan dan Pelatihan								
			Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai sasaran Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ada 2 (dua) yaitu:

1. Meningkatkan sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN berbasis merit Peningkatan Kualitas SDM ASN
2. Menerapkan sistem manajemen ASN berbasis kualifikasi dan kompetensi Penguatan Disiplin, Etika, dan Integritas ASN

Dari strategi tersebut dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Strategi	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	Meningkatnya sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN berbasis merit	Penyusunan regulasi teknis & pemetaan awal talent pool ASN; integrasi data kepegawaian dengan SIASN dan SIMPATIK	Implementasi sistem rekrutmen & mutasi berbasis kompetensi melalui e-formasi & e-mutasi; uji coba merit system di OPD prioritas	Perluasan penerapan merit system ke seluruh OPD; monitoring & evaluasi berbasis indikator	Penguatan sistem pengawasan berbasis digital (e-disiplin, e-kinerja); integrasi reward & punishment	Evaluasi menyeluruh kinerja sistem merit
2	Menerapkan sistem manajemen ASN berbasis kualifikasi dan kompetensi	Pelatihan Guru Berbasis Literasi dan Numerasi: Peningkatan kompetensi guru melalui workshop dan pelatihan berkelanjutan agar mereka mampu mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam pembelajaran semua mata pelajaran.	Pelaksanaan diklat berbasis kompetensi & sertifikasi jabatan; integrasi hasil diklat ke talent pool	Implementasi *career path* ASN berbasis kualifikasi & kompetensi; coaching & mentoring sistematis	Optimalisasi LMS dan digital learning (Sip Tenan, Auto Simpatik) untuk seluruh ASN; monitoring outcome pelatihan	Evaluasi keberhasilan pengembangan kompetensi ASN

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam konteks tersebut, salah satu kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Peningkatan implementasi Sistem Merit pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kebijakan ini bertujuan memastikan Mewujudkan Aparatur yang Profesional dan Berintegritas, Meningkatkan Keadilan dan Transparansi dalam Manajemen ASN pertumbuhan, serta Mendukung Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Pengaturan dan evaluasi kebijakan tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim kepegawaian yang baik dan kondusif bagi perkembangan kemampuan Aparatur yang profesionalitas. Berikut adalah tabel arah kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kepada masyarakat	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan sistem merit.	Meningkatkan manajemen ASN dengan mengoptimalkan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan berbasis pada kualifikasi, kompetensi, serta kebutuhan jabatan yang terstruktur dan berbasis data.	Peningkatan implementasi Sistem Merit pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang 2025 - 2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas pelayanan Kepada masyarakat	Meningkatkan penyelenggaran negara yang profesional dan bertanggungjawab				Indeks Sistem Merit		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya profesionalitas Kepegawaian ASN			Indeks Profesionalitas ASN		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan jabatan		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian
				Meningkatnya kualitas Pengadaan	Persentase pelaksanaan Pengadaan	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Koordinator Penetapan dan Pengadaan Pegawai
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Staff Sub Bidang Penetapan dan Pengadaan Pegawai

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Staff Sub Bidang Penetapan dan Pengadaan Pegawai
				Meningkatnya kualitas administrasi pemberhentian	Persentase pelaksanaan Pemberhentian	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Koordinator Pemberhentian Pegawai
				Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Staff Sub Bidang Pemberhentian Pegawai
				Meningkatnya kualitas Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Informasi Kepegawaian ASN	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Koordinator Data dan Informasi Pegawai
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Staff Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai
				Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Staff Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai
			Meningkatnya kompetensi dan kesempatan		Persentase Pengembangan Karir ASN	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			ASN secara adil dan objektif	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Mutasi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Sub Koordinator Penempatan
				Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pengelolaan Mutasi ASN	Staff Sub Bidang Penempatan
				Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Staff Sub Bidang Penempatan
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Promosi ASN	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Sub Koordinator Jabatan
				Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Staff Sub Bidang Jabatan
				Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Sub Koordinator Pengembangan Karier
				Terkelolanya Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Staff Sub Bidang Pengembangan Karier

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Staff Sub Bidang Pengembangan Karier
				Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Staff Sub Bidang Pengembangan Karier
			Meningkatnya kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional
				Terlaksananya kegiatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
			Meningkatnya kinerja ASN		Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			yang berkualitas	Meningkatnya kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub Koordinator Disiplin dan Kelompok Jabatan Fungsional
				Meningkatnya Pembinaan Displin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	Staff Sub Bidang Disiplin
				Terselesaikannya Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Staff Sub Bidang Disiplin
				Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Staff Sub Bidang Disiplin
				Meningkatnya kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub Koordinator Kesejahteraan dan Kelompok Jabatan Fungsional
				Meningkatnya Pembinaan Displin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	Staff Sub Bidang Kesejahteraan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terselenggaranya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Staff Sub Bidang Kesejahteraan
				Meningkatnya kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub Koordinator Kepangkatan dan Penghargaan dan Kelompok Jabatan Fungsional
				Terselenggaranya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Staff Sub Bidang Kepangkatan dan Penghargaan
				Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Staff Sub Bidang Kepangkatan dan Penghargaan
			Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif		Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
				Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Sub Koordinator Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Staff Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
				Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Staff Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
				Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Staff Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Staff Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Staff Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Staff Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja BKPP			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
				TersedianyaDokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
				Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Meningkatnya kemampuan ASN BKPP Kota Semarang	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staff Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang terdapat pada lampiran tabel berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BKPP KOTA SEMARANG				**33.134.453.856**		**32.065.632.097**		**35.586.185.409**		**37.118.494.082**		**37.399.957.410**		**38.063.871.115**	
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**1.692.259.933**		**1.647.004.199**		**1.720.646.297**		**2.135.125.902**		**1.992.259.933**		**2.235.125.902**	
Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan jabatan	**Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi**	**95%**	**95%**	**1.692.259.933**	**95,50 %**	**1.647.004.199**	**96,50 %**	**1.720.646.297**	**97%**	**2.135.125.902**	**97,50 %**	**1.992.259.933**	**97,50 %**	**2.235.125.902**	
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.692.259.933		1.647.004.199		1.720.646.297		2.135.125.902		1.992.259.933		2.235.125.902	
Meningkatnya kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95%	95%	1.692.259.933	95%	1.647.004.199	96%	1.720.646.297	96%	2.135.125.902	97%	1.992.259.933	98%	2.235.125.902	
5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				276.073.320		230.817.586		276.073.320		518.939.289		276.073.320		518.939.289	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	276.073.320	2 Dokumen	230.817.586	2 Dokumen	276.073.320	2 Dokumen	518.939.289	2 Dokumen	276.073.320	2 Dokumen	518.939.289	
	Jumlah peserta kegiatan	300 Orang	300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		
	Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3 Buku	3 Buku		3 Buku		3 Buku		3 Buku		3 Buku		3 Buku		
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				518.939.289		518.939.289		518.939.289		518.939.289		718.939.289		518.939.289	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	4 Dokumen	518.939.289	4 Dokumen	518.939.289	4 Dokumen	518.939.289	4 Dokumen	518.939.289	4 Dokumen	718.939.289	4 Dokumen	518.939.289	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah peserta seleksi CASN	12.000 Orang	12.000 Orang		12.000 Orang		12.000 Orang		12.000 Orang		12.000 Orang		12.000 Orang		
		5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				440.135.405		440.135.405		440.135.405		440.135.405		540.135.405		540.135.405	
		Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	666 Dokumen	666 Dokumen	440.135.405	666 Dokumen	440.135.405	666 Dokumen	440.135.405	666 Dokumen	440.135.405	666 Dokumen	540.135.405	666 Dokumen	540.135.405	
			Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	75 Orang	150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		
			Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	775 Surat Keputusan	729 Surat Keputusan		743 Surat Keputusan		627 Surat Keputusan		597 Surat Keputusan		569 Surat Keputusan		569 Surat Keputusan		
		5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				218.256.750		218.256.750		238.256.750		218.256.750		218.256.750		218.256.750	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	218.256.750	2 Dokumen	218.256.750	2 Dokumen	238.256.750	2 Dokumen	218.256.750	2 Dokumen	218.256.750	2 Dokumen	218.256.750	
			Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	1 aplikasi	3 aplikasi		3 aplikasi		3 aplikasi		4 aplikasi		5 aplikasi		5 aplikasi		
		5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian				238.855.169		238.855.169		247.241.533		438.855.169		238.855.169		438.855.169	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9.000 Dokumen	9.000 Dokumen	238.855.169	9.000 Dokumen	238.855.169	9.000 Dokumen	247.241.533	9.000 Dokumen	438.855.169	9.000 Dokumen	238.855.169	9.000 Dokumen	438.855.169	
			Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	10 Orang	10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		
			Layanan pengurusan kartu istri	100 Orang	1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		
			Layanan pengurusan kartu suami	100 Orang	1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		
			Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	500 Orang	1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		
			Layanan update data pegawai	10.000 Orang	10.000 Orang		10.000 Orang		10.000 Orang		10.000 Orang		10.000 Orang		10.000 Orang		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Pengelolaan arsip pegawai	10.000 Orang	10.000 Orang		10.000 Orang		10.000 Orang		10.000 Orang		10.000 Orang		10.000 Orang		
	Layanan kartu pegawai	100 Orang	300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		
	Layanan cetak id card	1.150 buah	1.150 buah		1.150 buah		1.150 buah		1.150 buah		1.150 buah		1.150 buah		
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**3.559.521.091**		**3.559.521.091**		**4.031.179.491**		**3.935.961.796**		**3.940.571.557**		**4.053.294.195**	
Meningkatnya kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif	**Persentase Pengembangan Karir ASN**	**95%**	**95%**	**3.559.521.091**	**96%**	**3.559.521.091**	**96%**	**4.031.179.491**	**96%**	**3.935.961.796**	**97%**	**3.940.571.557**	**98%**	**4.053.294.195**	
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN				2.464.906.700		2.464.906.700		2.641.444.800		2.464.906.700		2.480.869.895		2.641.444.800	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	95%	95%	2.464.906.700	95%	2.464.906.700	96%	2.641.444.800	96%	2.464.906.700	97%	2.480.869.895	98%	2.641.444.800	
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN				509.698.900		509.698.900		509.698.900		509.698.900		509.698.900		509.698.900	
Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350 Dokumen	350 Dokumen	509.698.900	350 Dokumen	509.698.900	350 Dokumen	509.698.900	350 Dokumen	509.698.900	350 Dokumen	509.698.900	350 Dokumen	509.698.900	
	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		
	Mutasi Intern PNS	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	Perubahan Jabatan ASN	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	Tes Mutasi Masuk PNS	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				333.160.800		333.160.800		509.698.900		333.160.800		349.123.995		509.698.900	
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1400 Dokumen	1400 Dokumen	333.160.800	1400 Dokumen	333.160.800	1400 Dokumen	509.698.900	1400 Dokumen	333.160.800	1400 Dokumen	349.123.995	1400 Dokumen	509.698.900	
	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 Kali	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	8 Kegiatan	8 Kegiatan		8 Kegiatan		8 Kegiatan		8 Kegiatan		8 Kegiatan		8 Kegiatan		
			Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		
			Penyerahan SK kenaikan pangkat	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		
			Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		
			Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN				1.622.047.000		1.622.047.000		1.622.047.000		1.622.047.000		1.622.047.000		1.622.047.000	
		Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	300 Dokumen	1.622.047.000	300 Dokumen	1.622.047.000	300 Dokumen	1.622.047.000	300 Dokumen	1.622.047.000	300 Dokumen	1.622.047.000	300 Dokumen	1.622.047.000	
			Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		
			Pembuatan aplikasi	2 aplikasi	0 aplikasi		0 aplikasi		0 aplikasi		0 aplikasi		0 aplikasi		0 aplikasi		
			Sosialisasi Penguatan sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		
			Penilaian mandiri sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
			Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
			Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Uji kompetensi JPT Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
			Pelantikan struktural	3 Kegiatan	4 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		
			Uji Kompetensi Administrasi	0 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		
			Penyusunan Perwal	2 Kegiatan	2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Managemen Talenta ASN		1 Kegiatan	1 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN				1.094.614.391		1.094.614.391		1.389.734.691		1.471.055.096		1.459.701.662		1.411.849.395	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	95%	95%	1.094.614.391	95%	1.094.614.391	96%	1.389.734.691	96%	1.471.055.096	97%	1.459.701.662	98%	1.411.849.395	
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				742.777.191		742.777.191		742.777.191		742.777.191		742.777.191		742.777.191	
Terkelolanya Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	100 Orang	742.777.191	100 Orang	742.777.191	100 Orang	742.777.191	100 Orang	742.777.191	100 Orang	742.777.191	100 Orang	742.777.191	
	Penyelesaian ijin belajar	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12 Bulan	12 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	Pelaksanaan UKPPI	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	5 Orang	4 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		4 Orang		4 Orang		
	Pelaksanaan ujian dinas	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				296.957.500		296.957.500		596.957.500		596.957.500		596.957.500		596.957.500	
Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	300 Orang	300 Orang	296.957.500	300 Orang	296.957.500	300 Orang	596.957.500	300 Orang	596.957.500	300 Orang	596.957.500	300 Orang	596.957.500	
	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	Kenaikan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		
	Pembekalan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan		2 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		
			Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		
			Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		
			Update data jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		
		5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS			54.879.700		54.879.700	430 Orang	50.000.000		131.320.405		119.966.971		72.114.704	
		Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	430 Orang	430 Orang	54.879.700	430 Orang	54.879.700	430 Orang	50.000.000	430 Orang	131.320.405	430 Orang	119.966.971	430 Orang	72.114.704	
			Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	25 Orang	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		
			Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	25 Orang	15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		
			Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	1.000 Orang	400 Orang		600 Orang		500 Orang		400 Orang		400 Orang		400 Orang		
			Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	750 Orang	250 Orang		1.000 Orang		200 Orang		200 Orang		200 Orang		200 Orang		
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						**445.738.906**		**445.738.906**		**742.777.191**		**742.777.191**		**445.738.906**		**742.777.191**	
Meningkatnya kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif			**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas**	**95%**	**95%**	**445.738.906**	**96%**	**445.738.906**	**96%**	**742.777.191**	**96%**	**742.777.191**	**97%**	**445.738.906**	**98%**	**742.777.191**	
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN					445.738.906		445.738.906		742.777.191		742.777.191		445.738.906		742.777.191	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	95%	95%	445.738.906	95%	445.738.906	96%	742.777.191	96%	742.777.191	97%	445.738.906	98%	742.777.191	
5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				445.738.906		445.738.906		742.777.191		742.777.191		445.738.906		742.777.191	
Terlaksananya kegiatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	445.738.906	100 Orang	445.738.906	100 Orang	742.777.191	100 Orang	742.777.191	100 Orang	445.738.906	100 Orang	742.777.191	
	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300 Orang	300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		
	Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100 Orang	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		
	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
	Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**1.919.748.200**		**1.997.757.084**		**1.964.757.084**		**1.997.757.084**		**2.497.757.084**		**1.997.757.084**	
Meningkatnya kinerja ASN yang berkualitas	**Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik**	**95%**	**95%**	**1.919.748.200**	**96%**	**1.997.757.084**	**96%**	**1.964.757.084**	**96%**	**1.997.757.084**	**97%**	**2.497.757.084**	**98%**	**1.997.757.084**	
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.919.748.200		1.997.757.084		1.964.757.084		1.997.757.084		2.497.757.084		1.997.757.084	
Meningkatnya kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	95%	1.919.748.200	95%	1.997.757.084	96%	1.964.757.084	96%	1.997.757.084	97%	2.497.757.084	98%	1.997.757.084	
5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			206.887.270		221.896.154		221.896.154		221.896.154		421.896.154		221.896.154	
Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	206.887.270	1 Dokumen	221.896.154	1 Dokumen	221.896.154	1 Dokumen	221.896.154	1 Dokumen	421.896.154	1 Dokumen	221.896.154	
	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	4 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Monev penilaian kinerja ASN	2 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
		5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				1.091.979.710		1.091.979.710		1.091.979.710		1.091.979.710		1.291.979.710		1.091.979.710	
		Terselenggaranya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	365 Orang	365 Orang	1.091.979.710	365 Orang	1.091.979.710	365 Orang	1.091.979.710	365 Orang	1.091.979.710	365 Orang	1.291.979.710	365 Orang	1.091.979.710	
			Pelaksanaan konseling	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Pelaksanaan senam pegawai	44 Kali	22 Kali		22 Kali		22 Kali		22 Kali		22 Kali		22 Kali		
			Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1 Buku	1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
			Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	50 Orang	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		
			Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	60 Orang	30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		
			Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	180 Piagam	200 Piagam		200 Piagam		200 Piagam		200 Piagam		200 Piagam		200 Piagam		
			Penyelesaian berkas ijin cuti	40 berkas	40 berkas		40 berkas		40 berkas		40 berkas		40 berkas		40 berkas		
			Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	3 Orang	9 Orang		9 Orang		9 Orang		9 Orang		9 Orang		9 Orang		
			Sosialisasi TPP	0 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		
			Verifikasi e-cuti	480 berkas	250 berkas		250 berkas		250 berkas		250 berkas		250 berkas		250 berkas		
			Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	0 berkas	50 berkas		50 berkas		50 berkas		50 berkas		50 berkas		50 berkas		
			Pemeliharaan Aplikasi TPP	1 Kegiatan	1 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		
			Tersusunnya Perkada TPP	1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN				489.773.780		489.773.780		489.773.780		489.773.780		589.773.780		489.773.780	
		Meningkatnya Pembinaan Displin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.000 Orang	1.000 Orang	489.773.780	1.000 Orang	489.773.780	1.000 Orang	489.773.780	1.000 Orang	489.773.780	1.000 Orang	589.773.780	1.000 Orang	489.773.780	
			Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	90 Kegiatan	80 Kegiatan		80 Kegiatan		80 Kegiatan		80 Kegiatan		80 Kegiatan		80 Kegiatan		
			Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		
			Pelepasan haji	2 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
			Bimbingan mental	14 Kegiatan	10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		
			Pembekalan disiplin	3 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKPN	2 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
			Sosialisasi Disiplin ASN	1 kegiatan	2 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		
		5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				115.254.960		148.254.960		115.254.960		148.254.960		148.254.960		148.254.960	
		Terselesaikannya Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	115.254.960	12 Laporan	148.254.960	12 Laporan	115.254.960	12 Laporan	148.254.960	12 Laporan	148.254.960	12 Laporan	148.254.960	
			Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	75 Orang	65 Orang		65 Orang		65 Orang		65 Orang		65 Orang		65 Orang		
			Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 Kasus	2 Kasus		2 Kasus		2 Kasus		2 Kasus		2 Kasus		2 Kasus		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan	12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		
	Penyelenggaraan sidang kasus ASN	2 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	27 Dokumen	25 Dokumen		24 Dokumen		23 Dokumen		23 Dokumen		23 Dokumen		22 Dokumen		
5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				15.852.480		45.852.480		45.852.480		45.852.480		45.852.480		45.852.480	
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	25 Dokumen	15.852.480	25 Dokumen	45.852.480	25 Dokumen	45.852.480	25 Dokumen	45.852.480	25 Dokumen	45.852.480	25 Dokumen	45.852.480	
	Pemperosesan ijin pereceraian	30 Kasus	27 Kasus		26 Kasus		25 Kasus		24 Kasus		23 Kasus		22 Kasus		
05.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**7.392.150.738**		**7.423.935.916**		**8.209.355.856**		**8.551.207.173**		**8.614.000.402**		**8.762.116.626**	
Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif	**Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**55%**	**55%**	**7.392.150.738**	**55%**	**7.423.935.916**	**60%**	**8.209.355.856**	**65%**	**8.551.207.173**	**75%**	**8.614.000.402**	**80%**	**8.762.116.626**	
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis				1.865.090.596		1.653.171.796		2.302.019.129		1.653.171.796		1.709.987.276		1.709.987.276	
Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	95%	95%	1.865.090.596	95%	1.653.171.796	95%	2.302.019.129	96%	1.653.171.796	97%	1.709.987.276	98%	1.709.987.276	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				36.500.000		36.500.000		36.500.000		36.500.000		36.500.000		36.500.000	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen	1 Dokumen	36.500.000	1 Dokumen	36.500.000	1 Dokumen	36.500.000	1 Dokumen	36.500.000	1 Dokumen	36.500.000	1 Dokumen	36.500.000	
			Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
		5.04.02.2.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				254.450.000		150.860.500		150.860.500		150.860.500		150.860.500		150.860.500	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	600 Orang	600 Orang	254.450.000	600 Orang	150.860.500	600 Orang	150.860.500	600 Orang	150.860.500	600 Orang	150.860.500	600 Orang	150.860.500	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
			Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
			Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
			Sertifikasi Manajemen Mutu Pelatihan	1 Kegiatan	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		
		5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat			1.361.968.096		1.361.968.096		2.010.815.429		1.361.968.096		1.361.968.096		1.361.968.096	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	600 Orang	600 Orang	1.361.968.096	600 Orang	1.361.968.096	600 Orang	2.010.815.429	600 Orang	1.361.968.096	600 Orang	1.361.968.096	600 Orang	1.361.968.096	
			Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	514 Orang	565 Orang		565 Orang		565 Orang		565 Orang		565 Orang		565 Orang		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				212.172.500		103.843.200		103.843.200		103.843.200		160.658.680		160.658.680	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	212.172.500	1 Dokumen	103.843.200	1 Dokumen	103.843.200	1 Dokumen	103.843.200	1 Dokumen	160.658.680	1 Dokumen	160.658.680	
			Evaluasi Pasca Diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
			Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					5.527.060.142		5.770.764.120		5.907.336.727		6.898.035.377		6.904.013.126		7.052.129.350	
	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	95%	95%	5.527.060.142	95%	5.770.764.120	95%	5.907.336.727	96%%	6.898.035.377	97%	6.904.013.126	98%	7.052.129.350	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5.527.060.142		5.770.764.120		5.907.336.727		6.898.035.377		6.904.013.126	3 Laporan	7.052.129.350	
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	3 Laporan	5.527.060.142	3 Laporan	5.770.764.120	3 Laporan	5.907.336.727	3 Laporan	6.898.035.377	3 Laporan	6.904.013.126	3 Laporan	7.052.129.350	
	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	236 Orang	1.241 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		
	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	5 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		
	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30 Orang	5 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		
	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	60 Orang	0 Orang		90 Orang		90 Orang		90 Orang		90 Orang		90 Orang		
	Jumlah peserta latsar (pengiriman)	12 Orang	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		
	Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35 Orang	35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang		
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**18.125.034.988**		**16.991.674.901**		**18.917.469.490**		**19.755.664.936**		**19.909.629.528**		**20.272.800.117**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja BKPP	**Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**18.125.034.988**	**100%**	**16.991.674.901**	**100%**	**18.917.469.490**	**100%**	**19.755.664.936**	**100%**	**19.909.629.528**	**100%**	**20.272.800.117**	
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				123.700.705		137.704.037		142.285.290		141.089.083		139.410.204		144.015.951	
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai peraturan perundangan	82 Nilai	82 Nilai	123.700.705	82 Nilai	137.704.037	82 Nilai	142.285.290	82 Nilai	141.089.083	82 Nilai	139.410.204	82 Nilai	144.015.951	
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				51.163.683		51.163.683		51.163.683		51.163.683		51.163.683		51.163.683	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	51.163.683	3 Dokumen	51.163.683	3 Dokumen	51.163.683	3 Dokumen	51.163.683	3 Dokumen	51.163.683	3 Dokumen	51.163.683	
	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.075.254		7.827.800		7.192.800		7.745.300		8.848.857		8.848.857	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.075.254	2 Dokumen	7.827.800	2 Dokumen	7.192.800	2 Dokumen	7.745.300	2 Dokumen	8.848.857	2 Dokumen	8.848.857	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
		X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.075.254		4.075.254		7.056.400		7.598.300		4.075.254		8.681.001	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.075.254	1 Dokumen	4.075.254	1 Dokumen	7.056.400	1 Dokumen	7.598.300	1 Dokumen	4.075.254	1 Dokumen	8.681.001	
			Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
		X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.907.975		2.625.800		3.080.000		2.598.000		2.968.355		2.968.355	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.907.975	1 Dokumen	2.625.800	1 Dokumen	3.080.000	1 Dokumen	2.598.000	1 Dokumen	2.968.355	1 Dokumen	2.968.355	
			Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
			Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
		X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.042.399		2.625.800		2.812.800		2.598.100		2.968.355		2.968.355	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.042.399	1 Dokumen	2.625.800	1 Dokumen	2.812.800	1 Dokumen	2.598.100	1 Dokumen	2.968.355	1 Dokumen	2.968.355	
			Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.436.140		19.385.700		20.979.607		19.385.700		19.385.700		19.385.700	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5.436.140	5 Laporan	19.385.700	5 Laporan	20.979.607	5 Laporan	19.385.700	5 Laporan	19.385.700	5 Laporan	19.385.700	
			Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		
		X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung StatistikSektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.161.856.560		13.081.096.760		13.089.112.860		13.080.806.757		15.075.575.160		13.084.387.186	
	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selesai ditindaklanjuti yang sesuai peraturan perundangan	5 kegiatan	5 kegiatan	13.161.856.560	5 kegiatan	13.081.096.760	5 kegiatan	13.089.112.860	5 kegiatan	13.080.806.757	5 kegiatan	15.075.575.160	5 kegiatan	13.084.387.186	
		X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.823.756.560		12.823.756.560		12.823.756.560		12.823.756.560		14.823.756.560		12.823.756.560	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang	76 Orang	12.823.756.560	76 Orang	12.823.756.560	76 Orang	12.823.756.560	76 Orang	12.823.756.560	76 Orang	14.823.756.560	76 Orang	12.823.756.560	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				335.405.400		249.124.000		249.124.000		247.894.897		249.124.000		248.938.257	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	335.405.400	12 Dokumen	249.124.000	12 Dokumen	249.124.000	12 Dokumen	247.894.897	12 Dokumen	249.124.000	12 Dokumen	248.938.257	
			Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				673.400		6.195.000		6.455.300		673.400		673.400		6.195.019	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	673.400	1 Laporan	6.195.000	1 Laporan	6.455.300	1 Laporan	673.400	1 Laporan	673.400	1 Laporan	6.195.019	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
		X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				785.800		785.800		4.947.200		4.358.000		785.800		785.800	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	785.800	2 Laporan	785.800	2 Laporan	4.947.200	2 Laporan	4.358.000	2 Laporan	785.800	2 Laporan	785.800	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		
		X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.235.400		1.235.400		4.829.800		4.123.900		1.235.400		4.711.550	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.235.400	1 Dokumen	1.235.400	1 Dokumen	4.829.800	1 Dokumen	4.123.900	1 Dokumen	1.235.400	1 Dokumen	4.711.550	
			Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		
	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					157.959.400		157.959.400		157.959.400		157.959.400		157.959.400		157.959.400	
	Meningkatnya kemampuan ASN BKPP Kota Semarang		Nilai Layanan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selesai ditindaklanjuti	1 kegiatan	1 kegiatan	157.959.400	1 kegiatan	157.959.400	1 kegiatan	157.959.400	1 kegiatan	157.959.400	1 kegiatan	157.959.400	1 kegiatan	157.959.400	
		X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				157.959.400		157.959.400		157.959.400		157.959.400		157.959.400		157.959.400	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	157.959.400	100 Orang	157.959.400	100 Orang	157.959.400	100 Orang	157.959.400	100 Orang	157.959.400	100 Orang	157.959.400	
			Jumlah peserta bintek internal	115 Orang	115 Orang		115 Orang		115 Orang		115 Orang		115 Orang		115 Orang		
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.088.922.526		1.016.053.895		1.854.291.340		1.850.664.592		1.113.343.595		1.639.951.787	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OutputMeningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang			Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 kegiatan	8 kegiatan	1.088.922.526	8 kegiatan	1.016.053.895	8 kegiatan	1.854.291.340	8 kegiatan	1.850.664.592	8 kegiatan	1.113.343.595	8 kegiatan	1.639.951.787	
	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					73.326.067		58.347.800		58.347.800		58.347.800		58.347.800		58.347.800	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	3 Paket	3 Paket	73.326.067	3 Paket	58.347.800	3 Paket	58.347.800	3 Paket	58.347.800	3 Paket	58.347.800	3 Paket	58.347.800	
			Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					194.949.464		157.059.100		237.124.690		254.348.800		254.348.800		254.348.800	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		JumlahPemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket	194.949.464	1 Paket	157.059.100	1 Paket	237.124.690	1 Paket	254.348.800	1 Paket	254.348.800	1 Paket	254.348.800	
			Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					95.449.188		95.449.188		179.041.403		95.449.188		95.449.188	1 Paket	155.655.923	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	95.449.188	1 Paket	95.449.188	1 Paket	179.041.403	1 Paket	95.449.188	1 Paket	95.449.188	1 Paket	155.655.923	
			Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					85.260.669		85.260.669		278.215.900		267.278.600		85.260.669		120.360.686	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	85.260.669	1 Paket	85.260.669	1 Paket	278.215.900	1 Paket	267.278.600	1 Paket	85.260.669	1 Paket	120.360.686	
			Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				995.404		995.404		995.404		995.404		995.404		995.404	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	995.404	1 Dokumen	995.404	1 Dokumen	995.404	1 Dokumen	995.404	1 Dokumen	995.404	1 Dokumen	995.404	
			Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				85.750.000		65.750.000		85.750.000		85.750.000		65.750.000		85.750.000	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu makanan dan minuman rapat	1 Laporan	1 Laporan	85.750.000	1 Laporan	65.750.000	1 Laporan	85.750.000	1 Laporan	85.750.000	1 Laporan	65.750.000	1 Laporan	85.750.000	
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				355.100.000		355.100.000		479.816.143		355.100.000		355.100.000		355.100.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	1 Laporan	1 Laporan	355.100.000	1 Laporan	355.100.000	1 Laporan	479.816.143	1 Laporan	355.100.000	1 Laporan	355.100.000	1 Laporan	355.100.000	
			Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				198.091.734		198.091.734		535.000.000		733.394.800		198.091.734		609.393.174	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	198.091.734	1 Dokumen	198.091.734	1 Dokumen	535.000.000	1 Dokumen	733.394.800	1 Dokumen	198.091.734	1 Dokumen	609.393.174	
			Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					182.340.788		182.340.788		600.698.800		498.518.204		500.043.428		600.698.800	
	Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang		Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 kegiatan	1 kegiatan	182.340.788	1 kegiatan	182.340.788	2 kegiatan	600.698.800	1 kegiatan	498.518.204	1 kegiatan	500.043.428	1 kegiatan	600.698.800	
		X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				182.340.788		182.340.788		600.698.800		498.518.204		500.043.428		600.698.800	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	182.340.788	5 Unit	182.340.788	5 Unit	600.698.800	5 Unit	498.518.204	5 Unit	500.043.428	5 Unit	600.698.800	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
X.XX.01.2.0008 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.383.470.223		1.487.434.581		1.843.431.200		1.873.789.000		1.669.940.318		2.573.541.893	
Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 kegiatan	3 kegiatan	2.383.470.223	3 kegiatan	1.487.434.581	3 kegiatan	1.843.431.200	3 kegiatan	1.873.789.000	3 kegiatan	1.669.940.318	3 kegiatan	2.573.541.893	
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				654.116.904		684.255.981		774.919.200		774.919.200		766.761.718		884.255.981	
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	654.116.904	1 Laporan	684.255.981	1 Laporan	774.919.200	1 Laporan	774.919.200	1 Laporan	766.761.718	1 Laporan	884.255.981	
	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				248.734.007		208.666.600		374.000.000		404.357.800		208.666.600		208.666.600	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	248.734.007	1 Laporan	208.666.600	1 Laporan	374.000.000	1 Laporan	404.357.800	1 Laporan	208.666.600	1 Laporan	208.666.600	
	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
	Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1.480.619.312		594.512.000		694.512.000		694.512.000		694.512.000		1.480.619.312	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.480.619.312	1 Laporan	594.512.000	1 Laporan	694.512.000	1 Laporan	694.512.000	1 Laporan	694.512.000	1 Laporan	1.480.619.312	
	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.026.784.786		929.085.440		1.229.690.600		2.152.837.900		1.253.357.423		2.072.245.100	
Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 kegiatan	4 kegiatan	1.026.784.786	4 kegiatan	929.085.440	4 kegiatan	1.229.690.600	4 kegiatan	2.152.837.900	4 kegiatan	1.253.357.423	4 kegiatan	2.072.245.100	
X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.959.999		50.536.750		56.437.500		150.003.900		57.128.500		57.128.500	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	1 Unit	50.536.750	1 Unit	56.437.500	1 Unit	150.003.900	1 Unit	57.128.500	1 Unit	57.128.500	
	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				387.108.164		300.000.000		537.197.800		532.294.000		532.294.000		532.294.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	10 Unit	10 Unit	387.108.164	10 Unit	300.000.000	10 Unit	537.197.800	10 Unit	532.294.000	10 Unit	532.294.000	10 Unit	532.294.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Sub Kegiatan / Output			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
			Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
		X.XX.01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel				30.269.700		97.124.000		89.057.100		86.205.400		98.488.000		98.488.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	30.269.700	5 Unit	97.124.000	5 Unit	89.057.100	5 Unit	86.205.400	5 Unit	98.488.000	5 Unit	98.488.000	
			Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
		X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				565.446.923		481.424.690		546.998.200		1.384.334.600		565.446.923		1.384.334.600	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	565.446.923	4 Unit	481.424.690	4 Unit	546.998.200	4 Unit	1.384.334.600	4 Unit	565.446.923	4 Unit	1.384.334.600	
			Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	

Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mendukung pencapaian program prioritas Kepala Daerah yaitu 1) Program Kepegawaian Daerah; 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia.	Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan objektif	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
			Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	
			Pembinaan Disiplin ASN	

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
			Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	
			Pembinaan Disiplin ASN	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
2	Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia.	Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kepegawaian

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,79	0,82	0,84	0,87	0,89	0,91	
2	IP ASN	Angka	85	85,62	86,24	87	87,8	88,7	

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang ketenagakerjaan, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk kurun waktu perencanaan tahun 2025 hingga 2029. Indikator ini menjadi instrumen utama dalam mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan adalah "Meningkatnya target capaian Indeks Sistem Merit dan IP ASN"", yang mencerminkan tingkat efektivitas intervensi program ketenagakerjaan dalam menurunkan angka pengangguran secara bertahap. Target tahunan untuk indikator ini telah disusun secara progresif, dengan harapan mampu menjawab tantangan dinamika Kepegawaian dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Semarang.

Peningkatan target dari tahun ke tahun mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses kesempatan kerja, meningkatkan kualitas Kepegawaian melalui pelatihan dan sertifikasi, serta memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan industri. Dengan pencapaian target tersebut, diharapkan tingkat pengangguran di Kota Semarang dapat ditangani secara lebih optimal, sekaligus menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta mewujudkan tujuan strategis pembangunan bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menetapkan serangkaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung mencerminkan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. IKK ini disusun untuk memantau dan mengendalikan hasil dari intervensi pemerintah daerah selama periode 2025–2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	85	85,62	86,24	87	87,8	88,7	
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	315,73	355,92	396,11	436,3	476,49	516,68	
3	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,88	21,88	22,4	23	23,75	24,65	
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	76,45	76,46	76,47	76,48	76,50	76,52	
6	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	97,78	97,79	97,80	97,81	97,82	97,83	

Rencana Pendapatan ini merupakan wujud komitmen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam aspek peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan sumber daya aparatur sipil negara. Penyusunan rencana pendapatan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029.

Rencana Pendapatan ini memuat proyeksi dan arah kebijakan pendapatan yang dikelola atau berpotensi dikelola oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun potensi sumber pendanaan lainnya, dalam rangka mendukung pembiayaan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran realistis mengenai kapasitas pendapatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam mendukung kemandirian pembiayaan dan efektivitas pengelolaan anggaran ke depan.

Melalui Rencana Pendapatan ini, diharapkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat kapasitas fiskal kelembagaan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Rencana Pendapatan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

No.	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	100.000.000	95.026.700	101.678.569	108.796.069	116.411.794	124.560.619	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan bidang Kepegawaian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Permasalahan ketenagakerjaan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/ kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan ketenagakerjaan yang terpadu, berdayaguna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan ketenagakerjaan secara optimal dan terpadu.

Selain itu semua proses perencanaan tidak terlepas dari Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang tertuang dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2018 yang memiliki Pokok-Pokok Pengaturan sebagai berikut :

1. Kelembagaan PUG di Daerah
    a) Setiap Pemerintah Daerah wajib membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan perwakilan dari seluruh perangkat daerah.
    b) Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Gender Focal Point (GFP) sebagai penanggung jawab Pengarusutamaan Gender (PUG) di unit kerja masing-masing.
2. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
    a) Perangkat daerah wajib menyusun GAP (Gender Analysis Pathway) dan GAB (Gender Action Budget) sebagai prasyarat penganggaran kegiatan yang responsif gender.

b) PPRG harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, APBD).

3. Koordinasi dan Pembinaan
    a) Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan umum, sedangkan pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota.
    b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi koordinator pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.
4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
    a) Pemerintah daerah wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) secara periodik, serta melaporkan hasilnya kepada Mendagri melalui gubernur.
5. Pendanaan
    a) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat didukung oleh APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Berdasarkan isi Perwali ini, beberapa poin yang bisa dimasukkan ke dalam Renstra BKPP agar selaras:

1. Kewajiban Analisis Gender yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus memastikan setiap program/aktivitas kepegawaian melakukan Analisis Gender sebagai bagian dari perencanaan program.
2. Anggaran Responsif Gender yaitu Anggaran kegiatan kepegawaian harus dirancang responsif gender: adanya alokasi khusus, atau memastikan setiap kegiatan diperhitungkan dampak gendernya.
3. Sarana dan Prasarana Responsif Gender yaitu Memikirkan fasilitas kerja, ruang publik, ruang kantor, keselamatan & kenyamanan yang memperhatikan kebutuhan gender (misalnya fasilitas laktasi, aksesibilitas, dll).
4. Regulasi Internal dan Eksternal yaitu Kebijakan internal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan agar memuat aturan yang memperkuat keadilan gender (misalnya perekrutan, promosi, pelatihan) dan bagaimana OPD/instansi lain dilibatkan eksternalnya.
5. Penghargaan yaitu Memasukkan indikator kinerja terkait penghargaan bagi unit OPD atau individu yang berhasil melaksanakan PUG dengan baik.
6. Monitoring & Evaluasi yaitu Memasukkan mekanisme monev PUG: siapa yang memonitor (GFP, Pokja), bagaimana pelaporannya, frekuensi, indikator-kinerja yang jelas.

Harapannya Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

34. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Sehubungan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renstra BRIDA Kota Semarang juga perlu memperhatikan Renstra Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa

Tengah. Selanjutnya Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan BRIDA, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BRIDA Kota Semarang.

Gambar 1.1
Hubungan antar dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah

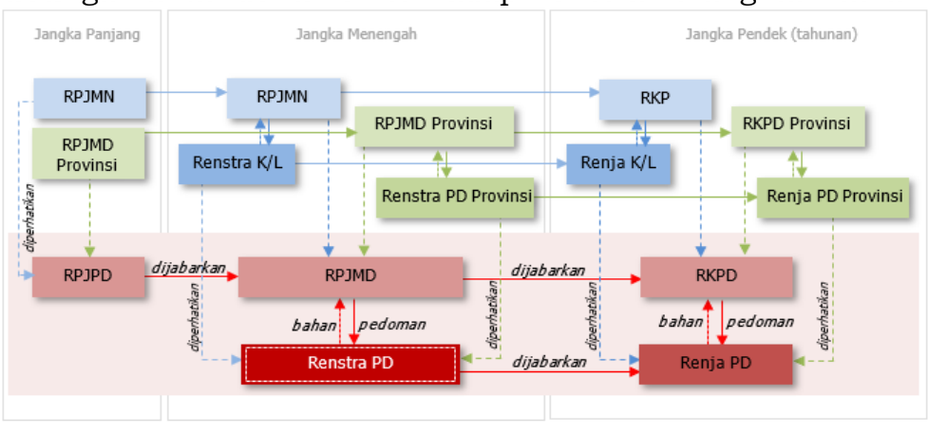

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7); dan
28. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh

personil BRIDA beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BRIDA secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BRIDA Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang penelitian dan pengembangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis BRIDA Kota Semarang

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi BRIDA Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BRIDA Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan BRIDA Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan BRIDA Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah memiliki peran penting sebagai acuan kerja. Penyusunan gambaran ini bertujuan untuk menjelaskan tugas, fungsi serta struktur organisasi BRIDA secara sistematis. Dengan adanya gambaran ini masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah dapat memahami bagaimana peran dan mekanisme kerja perangkat daerah. Selain itu gambaran pelayanan juga menjadi dasar untuk evaluasi kinerja, perencanaan program, peningkatan kualitas layanan publik, serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, tugas pokok dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perumusan kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Inovasi dan Teknologi;
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3) pengoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Inovasi dan Teknologi, dan UPTB;
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan;
5) penyelenggaraan kerja sama Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Inovasi dan Teknologi, dan UPTB;
6) penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
7) penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Inovasi dan Teknologi, dan UPTB;
8) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Inovasi dan Teknologi, dan UPTB;
9) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, BRIDA Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:

- Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
4. Bidang Inovasi dan Teknologi;
5. Tim Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. UPTB.

Secara lebih lengkapnya, struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi BRIDA Kota Semarang

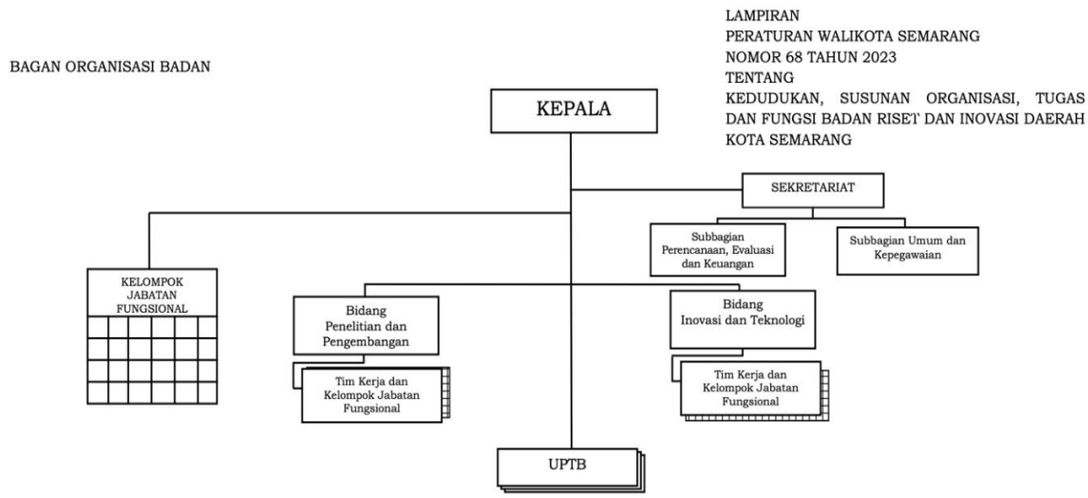

Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2023

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural BRIDA Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
   Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang memiliki tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
2. Sekretariat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Inovasi dan Teknologi, dan UPTB.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
   Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

4. Bidang Inovasi dan Teknologi
   Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Bidang Inovasi dan Teknologi.

2.1.2. Sumber Daya BRIDA Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Aparatur Sipil Negara pada BRIDA Kota Semarang berjumlah 20 orang melaksanakan tugas dan fungsi yang terbagi pada Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta Bidang Inovasi dan Teknologi. Adapun Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Tabel 2. 1
Daftar ASN BRIDA Kota Semarang Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
1	Bagus Irawan, S.T, M.T, M.Eng	Kepala Badan
2	Ir. Yudha Bhakti Diliawan, S.T, M.T	Sekretaris Badan
3	Wahyudi, S.STP,MM	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
4	Asdani Kindarto, S.Sos, M.Eng, Ph.D	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
5	Elisabeth Ika Retno Widiani, S.E	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
6	Novita Amalia, ST, MT	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7	Priyo Utamaji, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan
8	Wahyu Maulida Yusuf, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan
9	Mahanani Riska Wiyanti, S.S.T (TD)	Analis Rencana Program dan Kegiatan
10	TriyanI, S.Sos	Bendahara
11	Nanik Setyowati, ST	Peneliti Muda
12	Agus Ananto Widodo, S.AP, M.AP	Peneliti Pertama
13	Ardian Bakhtiar Rivai, S.Pd., M.A., M.Sc.	Peneliti Pertama
14	Gurindra Budi Prasetyo, M.A.	Peneliti Pertama
15	Muhammad Syofi'i, M.Sos	Peneliti Pertama
16	Nur Faizah, M.Si.	Peneliti Pertama
17	Luthfi Maharsa, S.T	Perekayasa
18	Widya Ratnawati, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama
19	Aulia Rizkiana, S.T.P., M.Sc.	Perekayasa Pertama
20	Eva Diah Zanuarini, S.Si., M.Si	Perekayasa Pertama
21	Geovani Delareza, S.P.W.K.	Pranata Kewilayahan
22	Al Zena Vashti Trimanta, A.Md.Kom	Pranata Komputer Terampil
23	Lailly Oktaviani, A.Md	Penata Laksana Barang Terampil

Sumber: BRIDA Kota Semarang per Agustus 2025

Dari diagram di atas, Sumber daya aparatur BRIDA pada tahun 2025 sebanyak 23 orang dengan rincian sebanyak 13 orang berjenis kelamin perempuan dan 10 orang berjenis kelamin laki-laki. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BRIDA Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan (terakhir)	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	-	-	-	-
4	D3	-	2	-	-	2
5	S1	3	6	-	-	9
6	S2	7	4	-	-	11
7	S3	1	-	-	-	1

Dari jumlah pegawai sebanyak 23 orang ini kemudian ditentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di BRIDA Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	2	2
2	Golongan III	8	10	18
3	Golongan IV	3	-	3

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi BRIDA Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di BRIDA Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Jenis Sarana dan Prasarana di BRIDA Kota Semarang

Kategori	**Jenis Sarana/Prasarana**	**Keterangan**
Gedung dan Ruang	Kantor BRIDA	Gedung operasional utama, digunakan untuk kegiatan administrasi dan koordinasi
	Ruang Rapat	Digunakan untuk diskusi internal, presentasi hasil kajian, dan koordinasi OPD
	Ruang Arsip dan Dokumentasi	Menyimpan dokumen hasil riset, laporan, dan data strategis
	Laboratorium Inovasi	Fasilitas pengujian dan pengembangan prototipe inovasi daerah
Teknologi Informasi	Server dan Jaringan Komputer	Mendukung sistem informasi riset dan pengolahan data
	Sistem Informasi JELITA	Platform digital untuk pengelolaan data riset dan inovasi daerah

Kategori	Jenis Sarana/Prasarana	Keterangan
	Website Resmi BRIDA	Media publikasi dan komunikasi eksternal
Peralatan Riset	Komputer dan Laptop Penunjang	Digunakan oleh tim peneliti dan analis
	Alat Ukur dan Survey Lapangan	Mendukung kegiatan kajian berbasis geospasial dan lingkungan
	Kamera Dokumentasi	Untuk dokumentasi kegiatan riset dan inovasi
Pendukung Kegiatan	Kendaraan Operasional	Mobil dinas untuk kegiatan lapangan dan koordinasi antar instansi
	Peralatan Presentasi	Proyektor, layar, dan sound system untuk kegiatan sosialisasi dan seminar

Tabel 2. 5
Aset Tanah BRIDA Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Peng-adaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRIDA Kota Semarang tidak memiliki aset tanah tersendiri, karena kantor Brida menempati Gedung Pandanaran

Tabel 2. 6
Gedung dan Bangunan BRIDA Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Kantor BRIDA Kota Semarang	Baik		Gedung Pandanaran		-	Kantor BRIDA Kota Semarang menempati Gedung Pandanaran di Lantai 1	-

2.1.3. Kinerja Pelayanan BRIDA Kota Semarang

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja BRIDA Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja BRIDA Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja BRIDA Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan serta urusan penunjang pemerintah daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan BRIDA Kota Semarang Tahun 2021 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Indikator Tujuan:**																		
	Nilai Indeks Inovasi Daerah	poin	-	v (IKU)	N/A	N/A	N/A	66	68	N/A	N/A	N/A	67,92	N/A	N/A	N/A	N/A	102%	N/A
2	**Indikator Sasaran:**																		
	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	-	v (IKU)	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Persentase naskah penelitian yang akurat dan sesuai dengan kaidah	%	-	v (IKU)	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Nilai AKIP Badan Riset dan Inovasi Daerah	poin	-	v (IKU)	N/A	N/A	N/A	71,32	78	N/A	N/A	N/A	78,75	N/A	N/A	N/A	N/A	110%	N/A
3	**Indikator Program:**																		
	Presentase pemenuhan dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi inovasi	%	-	v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Presentase pemenuhan laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	%		v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Presentase pemenuhan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	%	-	v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Presentase pemenuhan laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	%	-	v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025
	Persentase pemenuhan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	-	v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Persentase pemenuhan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	-	v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Persentase pemenuhan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%		v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	-	v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	-	v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	-	v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	-	v	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

Catatan: Tahun 2021-2023 tidak tersedia karena BRIDA berdiri sendiri mulai tahun 2024
Tahun 2025 masih berjalan sehingga realisasi belum tersedia

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
		13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
3	Satuan kinerja	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan BRIDA Kota Semarang

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan BRIDA Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan BRIDA Kota Semarang. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan BRIDA Kota Semarang.

Tabel 2. 8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BRIDA Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	N/A	N/A	N/A	4.816.482.489	5.998.389.194,60	N/A	N/A	N/A	3,619,050,213	N/A	N/A	N/A	N/A	75.14	N/A	0.25	N/A
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	N/A	N/A	N/A	377.878.903	797.974.237,00	N/A	N/A	N/A	330,166,335	N/A	N/A	N/A	N/A	87.37	N/A	1.11	N/A
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	N/A	N/A	N/A	853.920.000	612.611.056,18	N/A	N/A	N/A	759,231,524	N/A	N/A	N/A	N/A	88.91	N/A	-0.28	N/A
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	962.641.364	2.325.333.258,00	N/A	N/A	N/A	860.777.770	N/A	N/A	N/A	N/A	89.42	N/A	1.42	N/A
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	N/A	N/A	N/A	2,622,042,222	2.262.470.643,42	N/A	N/A	N/A	1.668.874.584	N/A	N/A	N/A	N/A	63.65	N/A	-0.14	N/A
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	4.798.592.019	5.081.743.383,21	N/A	N/A	N/A	3,870,212,916	N/A	N/A	N/A	N/A	80.65	N/A	0.06	N/A
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	64,380,000	90.455.628,38	N/A	N/A	N/A	53,252,134	N/A	N/A	N/A	N/A	82.72	N/A	1.41	N/A
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	2,906,338,000	4.536.683.600,81	N/A	N/A	N/A	2,299,427,309	N/A	N/A	N/A	N/A	79.12	N/A	0.56	N/A
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	44,400,000	14.164.240,00	N/A	N/A	N/A	13,850,000	N/A	N/A	N/A	N/A	31.19	N/A	0.68	N/A
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	1,129,884,460	190.960.864,02	N/A	N/A	N/A	974,774,573	N/A	N/A	N/A	N/A	86.27	N/A	0.83	N/A
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	75,068,990	93.195.490,00	N/A	N/A	N/A	27,959,000	N/A	N/A	N/A	N/A	37.24	N/A	-1.00	N/A

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	I 2021	II 2022	III 2023	IV 2024	V 2025	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	578,520,569	156.283.560,00	N/A	N/A	N/A	500,949,900	N/A	N/A	N/A	N/A	86.59	N/A	-0.73	N/A

Catatan: Tahun 2021-2023 tidak tersedia karena BRIDA berdiri sendiri mulai tahun 2024
Tahun 2025 masih berjalan sehingga realisasi belum tersedia

Keterangan:

1. Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya
2. Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun
3. Anggaran tahun kedua renstra disusun
4. Anggaran tahun ketiga renstra disusun
5. Anggaran tahun keempat renstra disusun
6. Anggaran tahun elima renstra disusun
7. Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun
8. Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun
9. Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun
10. Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun
11. Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun
12. Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
13. Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
14. Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
15. Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
16. Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
17. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keternagan 2-6
18. Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keternagan 7 -11

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

c. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Brida Kota Semarang memiliki peran penting sebagai lembaga yang mendukung pembangunan daerah melalui penguatan riset dan inovasi. Brida Kota Semarang diarahkan untuk memberikan layanan kepada berbagai pihak yang menjadi kelompok sasaran utamanya, dengan tujuan mendorong terciptanya kebijakan pembangunan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Kelompok sasaran pelayanan Brida mencakup berbagai unsur, mulai dari internal pemerintah hingga masyarakat luas. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang merupakan salah satu kelompok sasaran utama. Pada perangkat daerah, Brida menyediakan layanan berupa dukungan teknis, penelitian kebijakan, serta kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Peran ini menjadikan Brida sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis bukti.

Masyarakat umum dan pelaku dunia usaha turut menjadi bagian dari kelompok sasaran pelayanan Brida. Melalui hasil riset dan inovasi, Brida berupaya menciptakan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, seperti melalui pengembangan teknologi tepat guna, penyediaan data yang informatif, serta dukungan terhadap peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, Brida berfungsi sebagai jembatan antara hasil-hasil riset dengan kebutuhan praktis di lapangan, sehingga manfaat inovasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Riset merupakan dasar pengambilan kebijakan daerah, dan hasil riset memiliki peran penting dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahanan di daerah. Sesuai dengan tingkat koordinasi dan hierarki, pemberian pelayanan oleh BRIDA, dibedakan atas:

- Pelayanan Vertikal
  Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka menyampaikan rekomendasi hasil-hasil penelitian/kajian sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- Pelayanan Horizontal
  Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari Pusat maupun Daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil penelitian dan pengembangan, melalui pelayanan perpustakaan, publikasi hasil penelitian dan pengembangan di media cetak Jurnal Riptek Membangun yang terbit setiap 4 (empat) bulan sekali.
- Pelayanan Kemitraan/Kolaborasi Kemitraan
  Badan Riset dan Inovasi Daerah menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan:
  - Pemerintah, meliputi Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Lainnya, Pemerintah kab/Kota dan kelurahan;
  - Lembaga Penelitian PTN/PTS di Kota Semarang;
  - Lembaga Pendanaan;

- Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO;
- Dunia Usaha dan Industri; dan
- Jejaring/Komunitas.

Peningkatan layanan dan kerjasama dengan stakeholder terkait dimaksudkan agar menciptakan efisiensi, efektifitas dan sinergi pelaksanaan kegiatan riset di daerah, termasuk pengimplementasian hasil riset sehingga akan memberikan kontribusi sebagai pemecah permasalahan pemerintahan, memperkuat ekosistem riset dan pondasi ekonomi daerah berbasis riset serta bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk mendorong peningkatan daya saing dan inovasi daerah.

Gambar 2. 1
Kolaborasi Kerjasama Ekosistem Riset
dan Pondasi Pembangunan Daerah

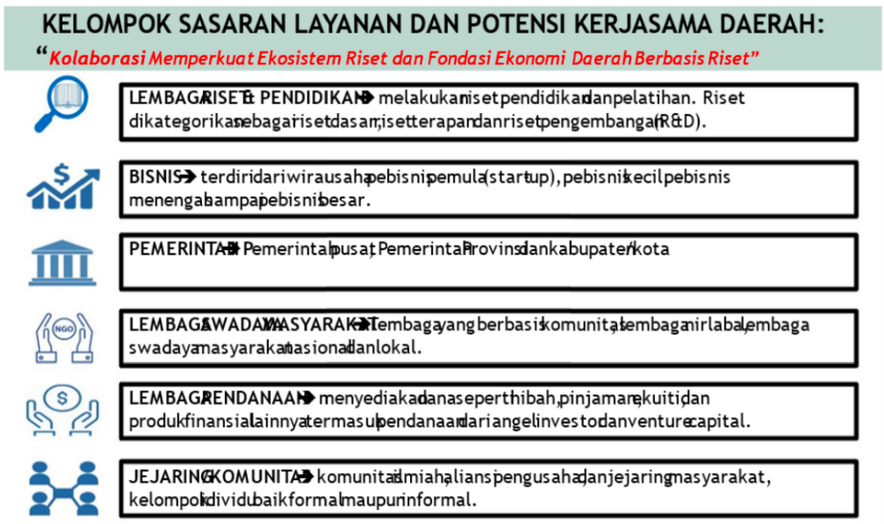

d. Inovasi Perangkat Daerah

Brida Kota Semarang tidak hanya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya Brida Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah diimplementasikan sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, antara lain:

1. Jurnal Riptek Online

   Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8820 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

Gambar 2. 2
Jurnal RIPTEK

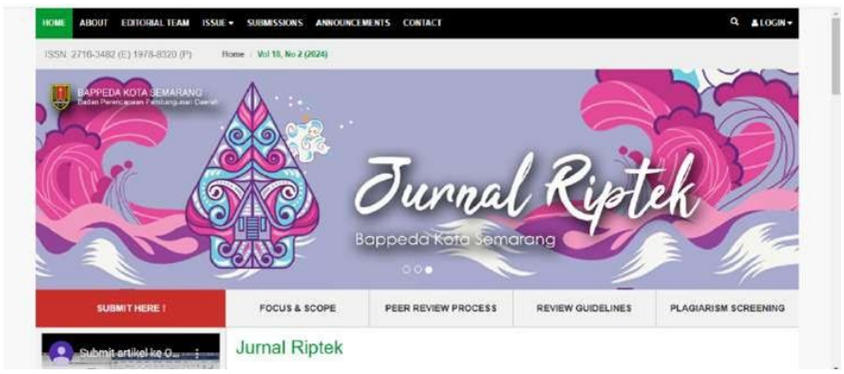

2. JELITA (Jendela Inovasi Kota)
   Website untuk mewadahi data-data kegiatan inovatif dari seluruh OPD se-Kota Semarang, dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA).

Gambar 2. 3
Jendela Inovasi Kota Semarang

Selain itu Brida Kota Semarang sebagai *leading sector* inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sekaligus sebagai verifikator untuk penilaian indeks inovasi daerah telah mengakomodasi beberapa inovasi unggulan yang menjadi komponen utama dalam penilaian Inovasi di Tingkat Pusat, beberapa inovasi tersebut adalah:

1. Citizen Science: Inovasi Instrumen dan Sistem Informasi Pemantauan Berbasis IoT untuk Daerah Aliran Sungai Perkotaan yang Berkelanjutan.

Gambar 2. 4
Sistem Informasi Pemantauan DAS Perkotaan

2. ModATHUS (Modified Alat Takar Hujan Sederhana) dan VEWS (Very Early Warning Systems) adalah sebuah instrumen dan sistem peringatan dini banjir dan tanah longsor berbasis IoT.

Gambar 2. 5
ModATHUS dan VEWS

3. SiTerka suatu aplikasi sistem determinasi Teknik Rehabilitasi Hutan Lahan/Konservasi Tanah dan Air (RHL/KTA) presisi berbasis android dan web.

Gambar 2. 6
SiTerka

4. WaterQ suatu instrumen monitoring kualitas dan kuantitas aliran sungai yang dilengkapi dengan sistem informasi dengan berbasis web dan android untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi kualitas dan kuantitas sungai secara realtime.

Gambar 2. 7
WaterQ

5. Riset Strategi Inovatif Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Kawasan Hulu (Mijen) dan Hilir (Pesisir Tugurejo) yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

Gambar 2. 8
Produksi Tanaman Padi Biosalin

6. Bawang Merah Varietas Tajuk, Varietas Bima Brebes, Varietas Maserati, VarietasLokananta di lokasi Kawasan pertanian Mijen

Gambar 2. 9
Produksi Tanaman Bawang Merah berbagai Varietas

8. Pengembangan Arsip, Manuskrip, Sejarah, Tradisi Lisan, dan Literasi Budaya

Gambar 2. 10
Penyerahan buku Pengembangan Arsip,
Manuskrip,Sejarah,Tradisi Lisan, dan Literasi Budaya

9. Potensi Indikasi Geografis Kota Semarang (Durian Malika, Ikan Asap, Batik Semarangan, Tahu Pong)

Gambar 2. 11
Potensi Indikasi Geografis Kota Semarang

e. Penghargaan Perangkat Daerah

Prestasi dan penghargaan merupakan suatu bentuk atas kinerja yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kota Semarang, berikut ini adalah beberapa prestasi dan penghargaan:

- Tahun 2024 Penghargaan Kota Sangat Inovatif dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA) Kementrian Dalam Negeri RI.
- Tahun 2024, Penghargaan Stand Pameran Terbaik dalam rangka Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Brida Provinsi Jawa Tengan pada tahun 2024.
- Tahun 2024, Jurnal RIPTEK yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi daerah Kota Semarang meraih peringkat akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024 dengan peringkat SINTA 4.

Gambar 2. 12
Piagam Penghargaan Kota Sangat Inovatif

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Brida Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Brida Kota Semarang sebagai berikut:

- Keterbatasan sumber daya peneliti dengan kompetensi spesifik serta minimnya alokasi anggaran riset membuat kualitas penelitian kurang maksimal.
- Hasil penelitian belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perangkat daerah sehingga tidak berdampak langsung pada kebijakan pembangunan.
- Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah daerah masih belum intensif dan terarah.
- Rendahnya literasi teknologi masyarakat menyebabkan inovasi sulit diadopsi secara luas.
- Keterbatasan sarana inkubasi, laboratorium, dan ruang uji coba membatasi pengembangan teknologi baru.
- Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengembangan inovasi masih rendah, serta terdapat potensi tumpang tindih antar program inovasi.

- Kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja belum optimal karena terbatasnya kapasitas SDM.
- Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih menghadapi kendala dalam transparansi dan akurasi.
- Pengelolaan kepegawaian dan pelayanan umum belum sepenuhnya berbasis digital sehingga proses birokrasi cenderung lambat.
- Tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Brida Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- Adanya regulasi nasional tentang riset dan inovasi memberi legitimasi bagi BRIDA untuk memperkuat peran riset dalam pembangunan.
- Potensi kerja sama dengan perguruan tinggi, industri, dan lembaga riset dapat meningkatkan kualitas penelitian.
- Meningkatnya kebutuhan perumusan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) membuka ruang lebih luas untuk pemanfaatan hasil riset.
- Konsep smart city yang dikembangkan Kota Semarang mendorong penggunaan teknologi dalam pelayanan publik.
- Dukungan program inovasi dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi modal penting untuk akselerasi inovasi.
- Semangat start-up, UMKM, dan komunitas inovasi lokal dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam pembangunan berbasis inovasi.
- Dukungan agenda reformasi birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberi arah penguatan tata kelola internal.
- Pemanfaatan aplikasi digital seperti e-planning, e-budgeting, dan e-SDM dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- Tersedia kesempatan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, serta benchmarking ke BRIDA daerah lain.
- Adanya tuntutan publik terhadap pelayanan yang lebih transparan dapat menjadi dorongan positif bagi BRIDA untuk terus berbenah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Riset dan Inovasi Daerah telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang No.68 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu: "Belum optimalnya inovasi dan riset daerah yang mendukung dan diimplementasikan dalam pembangunan" yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Rumusan Permasalahan
"Belum optimalnya inovasi dan riset daerah yang mendukung dan diimplementasikan dalam pembangunan"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, serta Ekonomi dan Pembangunan yang dapat diimplemetasikan dalam pembangunan daerah	Belum Optimalnya pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan Umum, Aspek- aspek Sosial, Perindustrian dan Perdagangan, serta Pekerjaan Umum
		Belum terbangunnya ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan
		Keterbatasan SDM dan anggaran riset
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian dalam dokumen perencanaan daerah
		Minimnya riset adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan lingkungan
		Rendahnya pemanfaatan riset untuk konservasi dan efisiensi sumber daya alam
		Minimnya riset dan dokumentasi budaya lokal yang terdigitalisasi
		Kurangnya inovasi berbasis kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan.
2	Belum optimalnya kualitas inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi/diseminasi serta partisipasi dari masyarakat dalam pengembangan inovasi dan teknologi
		Terbatasnya jumlah inovasi daerah yang terdokumentasi dan terdaftar secara nasional
		Kurangnya inovasi sosial yang mendorong partisipasi masyarakat
3	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
		Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Belum optimalnya kapasitas SDM kelitbangan dan inovasi.
		Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian
		Belum terintegrasinya data kompetensi ASN
		Belum maksimalnya pelaksanaan pengembangan karier dan pelatihan berbasis kebutuhan kelembagaan

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Semarang tahun 2024 tercatat sebesar 67,92, yang termasuk dalam kategori "Sangat Inovatif", capaian tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,85, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan *(gap)* yang menggambarkan bahwa, meskipun posisi Kota Semarang tergolong tinggi, inovasi dan penelitian pengembangan belum sepenuhnya menghasilkan kualitas yang dapat mendongkrak efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kualitas inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah
   Meski Kota Semarang sudah tergolong Sangat Inovatif berdasarkan IID, pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam pembangunan masih belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat fasilitasi, diseminasi, dan partisipasi masyarakat serta sektor swasta dalam proses inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan keberlanjutan inovasi masih menjadi tantangan utama.
3. Belum optimalnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
   Kinerja pelayanan internal Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Semarang masih belum maksimal jika dilihat dari capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP terakhir tercatat sebesar 78,75, yang menempatkan BRIDA di posisi ke-28 dari 52 OPD di Kota Semarang. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas

tata kelola internal—termasuk perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangan dan SDM masih perlu ditingkatkan agar mendukung riset dan inovasi secara lebih sistematis dan akuntabel.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025–2029 menekankan transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada penguatan riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks BRIDA Kota Semarang, terdapat beberapa isu strategis nasional yang relevan:

- Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah RPJMN mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem riset yang inklusif dan berdaya saing. BRIDA sebagai simpul riset daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan hasil kajian dan inovasi ke dalam kebijakan pembangunan Kota Semarang.
- Digitalisasi dan Pemanfaatan Big Data RPJMN menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. BRIDA diharapkan menjadi motor penggerak pemanfaatan data dan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).
- Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional. BRIDA berperan dalam mengembangkan riset-riset mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mendorong inovasi hijau yang relevan dengan karakteristik Kota Semarang.

Dengan demikian, Renstra BRIDA harus mengakomodasi arah kebijakan RPJMN melalui program riset tematik, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang, serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang sangat penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025–2029 adalah:

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif."

Misi dan program prioritas kepala daerah menekankan pada pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan yang responsif, serta penguatan ekonomi lokal berbasis inovasi. Telaahan terhadap visi dan misi ini menunjukkan relevansi langsung dengan urusan BRIDA, yaitu Penelitian dan Pengembangan:

- **Misi 1 dan 3: Pembangunan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan** BRIDA mendukung pencapaian misi ini melalui riset kebijakan, pengembangan model pendidikan berbasis teknologi, dan kajian peningkatan efektivitas pelayanan publik.
- **Program Prioritas 35 dan 37: Pengambilan Keputusan Berbasis Big Data dan Penguatan Riset Daerah** BRIDA menjadi aktor utama dalam membangun sistem data terintegrasi dan mendorong riset aplikatif yang menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
- **Program 30 dan 46: Pengembangan Desa Wisata Ekologis dan Pengendalian Banjir/Rob** BRIDA dapat menginisiasi kajian berbasis lingkungan dan teknologi untuk mendukung program-program ini, termasuk pengembangan inovasi lokal yang adaptif terhadap tantangan geografis Kota Semarang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang **riset dan inovasi daerah**, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan daya saing ekonomi daerah
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Telaahan ini menegaskan bahwa Renstra BRIDA harus selaras dengan visi kepala daerah, dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator **kinerja pembangunan berbasis riset dan inovasi**, serta mendukung pencapaian target RPJMD melalui penyediaan kajian strategis dan penguatan ekosistem inovasi.

c. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas

Sebagai kementerian yang memiliki fungsi perencanaan pembangunan nasional, Bappenas menetapkan arah kebijakan riset dan inovasi nasional yang menjadi acuan BRIDA dalam menyusun program kelitbangan dan inovasi daerah.

d. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi. BRIDA Kota Semarang mengadopsi pendekatan ini dalam mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

e. Telaahan Renstra Brida Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, Renstra BRIDA Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan Renstra BRIDA Kota Semarang. Renstra tersebut menekankan pentingnya:

- Penguatan ekosistem riset dan inovasi berbasis potensi lokal
- Sinergi antara BRIDA Provinsi dan BRIDA kabupaten/kota dalam penyusunan kajian strategis
- Peningkatan kualitas SDM peneliti dan perekayasa melalui pelatihan dan sertifikasi
- Pemanfaatan hasil litbang sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah
- Pengembangan sistem informasi kelitbangan yang terintegrasi antar wilayah

BRIDA Kota Semarang mengadopsi pendekatan ini dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator RPJMD Kota Semarang, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang yang mendukung visi dan misi Wali Kota Semarang, untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah:

"Meningkatnya Inovasi dalam Pelaksanaan Program Pemerintahan"

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang. Sasaran BRIDA Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan BRIDA

f. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Dihubungkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka BRIDA Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan BRIDA dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, BRIDA Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Arahan pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031, menetapkan bahwa:

Kawasan Tembalang dan Banyumanik diarahkan sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, dengan dukungan infrastruktur digital, laboratorium terpadu,

dan kemitraan strategis antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

Keterkaitan RTRW Kota Semarang dengan pelaksanaan program di BRIDA terwujud melalui penyesuaian arah riset dan inovasi dengan kebijakan pemanfaatan ruang kota. Penetapan Tembalang dan Banyumanik sebagai kawasan pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi menjadi peluang strategis bagi BRIDA untuk memperkuat jejaring kemitraan dan mendukung tumbuhnya pusat riset daerah, tanpa mengabaikan kebutuhan inovasi di kawasan lain. Program-program BRIDA dapat diarahkan secara adaptif sesuai karakteristik ruang, misalnya riset kelautan dan mitigasi bencana di kawasan pesisir, riset lingkungan di daerah perbukitan, serta riset inovasi pelayanan publik di kawasan perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan program BRIDA tidak hanya sejalan dengan RTRW, tetapi juga memastikan distribusi manfaat inovasi dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kota Semarang.

g. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan Kota Semarang yang semakin dinamis, isu lingkungan menjadi semakin kompleks dan menuntut pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan hidup, serta memastikan bahwa program dan kegiatan BRIDA Kota Semarang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029, BRIDA belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan secara komprehensif. Isu-isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi BRIDA dalam konteks KLHS meliputi:

Tabel 2. 10
Tema Isu KLHS terhadap BRIDA Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
	1. Minimnya kajian dampak inovasi teknologi terhadap ekosistem lokal
	2. Belum optimalnya riset adaptasi iklim berbasis komunitas
	3. Rendahnya pemanfaatan data riset untuk konservasi dan efisiensi SDA
	4. Kurangnya inovasi sosial yang mendorong keterlibatan publik
	5. Kurangnya kajian terkait dengan kelestarian budaya dan inovasi yang berbasis kearifan lokal Kota Semarang

Tabel 2. 11
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario Upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis riset yang diadopsi OPD	5	7	9	11	13	Minimal 10 rekomendasi kebijakan per tahun	Penguatan kolaborasi antar OPD dan perguruan tinggi
2	Jumlah inovasi daerah yang terdaftar di Jaringan Inovasi Nasional	2	4	6	8	10	10 inovasi daerah terdaftar	Pendampingan intensif dan fasilitasi pendaftaran inovasi
3	Persentase SDM BRIDA yang mengikuti pelatihan riset dan inovasi	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80% SDM terlatih	Kemitraan dengan lembaga pelatihan dan universitas
4	Jumlah riset yang mendukung adaptasi perubahan iklim	1	2	3	4	5	Minimal 5 riset tematik perubahan iklim	Integrasi isu iklim dalam agenda riset tahunan
5	Jumlah kajian pemanfaatan SDA berbasis efisiensi dan konservasi	2	3	4	5	6	6 kajian SDA strategis	Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan akademisi
6	Jumlah inovasi sosial berbasis partisipasi masyarakat	1	2	3	4	5	Minimal 5 inovasi sosial	Kompetisi inovasi dan inkubasi komunitas
7	Jumlah riset dan dokumentasi budaya lokal yang terdigitalisasi	2	4	6	8	10	10 dokumentasi budaya digital	Pengembangan platform digital budaya dan kerja sama dengan komunitas seni
8	Jumlah inovasi berbasis kearifan lokal yang diimplementasikan	1	2	3	4	5	Minimal 5 inovasi lokal	Integrasi kearifan lokal dalam desain program inovasi daerah

Sumber: BRIDA Kota Semarang

h. Telaahan Dokumen Lainnya

- **RPJMD Kota Semarang 2025–2029** Dokumen ini menekankan pentingnya pembangunan berbasis potensi lokal, termasuk pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas kota. BRIDA diharapkan berperan dalam menghasilkan kajian dan inovasi

yang mendukung pelestarian budaya serta penguatan nilai-nilai lokal dalam pembangunan.

- **Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2023** Peraturan ini menetapkan tugas dan fungsi BRIDA, termasuk pelaksanaan kajian dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah. Dalam konteks budaya, BRIDA memiliki kewenangan untuk melakukan riset kebijakan dan inovasi sosial yang dapat memperkuat pelestarian budaya lokal.
- **Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2025** Dalam evaluasi Renja, terdapat usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar BRIDA lebih aktif dalam mendokumentasikan dan mengembangkan budaya lokal, termasuk melalui digitalisasi dan penguatan komunitas budaya.
- **Form Kertas Kerja Penyusunan Renstra BRIDA 2025** Terdapat indikator dan sub-kegiatan yang mengarah pada pelestarian budaya, seperti "pengembangan inovasi berbasis kearifan lokal" dan "riset dokumentasi budaya Semarang" yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program strategis.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis BRIDA Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, serta telaahan terhadap:

- Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yang menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai pengungkit transformasi pembangunan nasional berbasis pengetahuan;
- Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025–2029, yang menggarisbawahi peran strategis BRIDA dalam menghasilkan kajian dan inovasi daerah yang adaptif dan berbasis potensi lokal;
- Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mendorong sinergi antara riset daerah dan kebijakan pembangunan provinsi;
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang, yang menjadi acuan spasial dalam pengembangan program riset dan inovasi;
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029, yang mengidentifikasi isu-isu strategis lingkungan, sosial, dan budaya yang perlu ditindaklanjuti melalui pendekatan riset dan inovasi;

Maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2. Belum optimalnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan program BRIDA Kota Semarang dalam Renstra Tahun 2025–2029, serta menjadi acuan dalam pengembangan indikator kinerja dan arah kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi.

Tabel 2. 12
Isu Perangkat Daerah BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi riset daerah dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan	Belum optimalnya penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, serta Ekonomi dan Pembangunan yang dapat diimplemetasikan dalam pembangunan daerah	- Minimnya kajian dampak inovasi teknologi terhadap ekosistem lokal. - Belum optimalnya riset adaptasi iklim berbasis komunitas. - Rendahnya pemanfaatan data riset untuk konservasi dan efisiensi SDA. - Kurangnya kajian terkait kelestarian budaya dan inovasi berbasis kearifan lokal Kota Semarang.	Perubahan iklim, krisis energi, hilangnya keanekaragaman hayati, transformasi digital global.	Agenda RPJMN 2025–2029, target net zero emission 2060, kebijakan BRIN, ekonomi hijau.	RPJPD Jawa Tengah, kebutuhan riset berbasis adaptasi iklim, konservasi SDA, dan pembangunan berkelanjutan kawasan Kedungsepur.	Belum optimalnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Potensi inovasi teknologi untuk peningkatan daya saing daerah	Belum optimalnya kualitas inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	- Minimnya kajian dampak inovasi teknologi terhadap ekosistem lokal. - Kurangnya inovasi sosial yang mendorong keterlibatan publik. - Kurangnya kajian terkait kelestarian budaya dan inovasi	Revolusi industri 4.0, perkembangan AI, green technology, smart city global.	Indonesia Digital 2045, Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Smart City nasional.	Penguatan inovasi Jawa Tengah, pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		berbasis kearifan lokal Kota Semarang.				
Potensi kelembagaan riset dan inovasi daerah	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah	- Kurangnya inovasi sosial yang mendorong keterlibatan publik. - Rendahnya pemanfaatan data riset untuk konservasi dan efisiensi SDA (terkait dengan belum kuatnya pengelolaan data & kapasitas lembaga riset).	Tuntutan good governance, transparansi, dan akuntabilitas lembaga riset.	Permendagri No. 7/2023 tentang BRIDA, reformasi birokrasi nasional, SAKIP.	Kolaborasi antar-BRIDA se-Jawa Tengah, jejaring riset perguruan tinggi dan swasta di Semarang.	Belum optimalnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi BRIDA Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BRIDA Kota Semarang.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Brida Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Brida Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang penelitian dan pengembangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Brida Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Brida Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Inovasi dalam Pelaksanaan Program Pemerintahan”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Brida Kota Semarang, yaitu “Indeks Inovasi Daerah Kota Semarang”.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari BRIDA Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam rangka pencapaian tujuan Brida maka ditetapkan sasaran dalam Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan BRIDA

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Brida Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran BRIDA Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sasaran RPJMD: Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Meningkatnya Inovasi dalam Pelaksanaan Program Pemerintahan		Indeks Inovasi Daerah	Angka	68	70,61	73,22	75,82	78,43	81,04
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	4,07	4,1	4,12	4,15	4,18	4,22
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	78	78,9	79,0	79,2	79,4	79,6
			Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	91,5	92	92,5	93	93,5	94

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Badan Riset dan inovasi Daerah Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Tahapan Strategi
BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kelembagaan dan SDM BRIDA	Pengembangan sistem informasi riset dan inovasi	Implementasi hasil riset dalam kebijakan publik	Evaluasi dan replikasi inovasi daerah yang berhasil	Konsolidasi dan penyusunan Renstra BRIDA periode berikutnya
Penyusunan roadmap riset dan inovasi Kota Semarang	Peningkatan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan dunia usaha	Diseminasi hasil riset ke perangkat daerah dan masyarakat	Penguatan tata kelola berbasis elektronik	Penyesuaian arah kebijakan dengan RPJPD dan RPJMN
Identifikasi isu strategis dan potensi riset lokal	Pelaksanaan riset prioritas daerah	Penerapan inovasi dalam	Monitoring dan evaluasi capaian Renstra	Penyusunan laporan akhir Renstra dan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		pelayanan publik		rekomendasi kebijakan
Sosialisasi dan pelatihan internal	Penerapan sistem monitoring kinerja riset	Penguatan branding BRIDA sebagai pusat inovasi daerah	Pengembangan model kolaborasi lintas sektor	Penyiapan SDM dan kelembagaan untuk Renstra 2031–2035
Penyesuaian program dengan RPJMD dan Renstra Nasional/Provinsi	Integrasi data riset ke dalam sistem perencanaan daerah	Evaluasi efektivitas program dan kegiatan	Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis riset	Finalisasi dan publikasi Renstra BRIDA 2025–2029

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Tabel 3. 2
Arah Kebijakan BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Implementasi Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan Permendagri No 86/2017 dan UU No. 23/2014	Mendorong Pembangunan Berbasis Data dan Inovasi	Penguatan kapasitas riset dan inovasi BRIDA	Sesuai dengan RPJMD 2025–2029 Kota Semarang
2	Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam riset dan inovasi	Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha	Pengembangan kemitraan strategis dan jejaring inovasi	Mendukung pencapaian SDGs dan RPJMN 2025–2029
3	Pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi	Diseminasi dan pemanfaatan hasil riset	Sesuai dengan arah kebijakan Renstra Bappenas dan Provinsi Jawa Tengah
4	Pengembangan sistem informasi riset dan inovasi daerah	Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Penguatan sistem informasi BRIDA yang terintegrasi	Mendukung SPBE dan kebijakan satu data
5	Monitoring dan evaluasi kinerja riset dan inovasi	Efisiensi dan efektivitas belanja daerah	Evaluasi dan replikasi inovasi yang berdampak	Sesuai dengan prinsip akuntabili-tas dan transparansi perencanaan pembangunan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Brida Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
BRIDA Kota Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Penanggung-jawab
Sasaran RPJMD: Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Meningkatnya Inovasi dalam Pelaksanaan Program Pemerintahan				**I**ndeks Inovasi Daerah		Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah			1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Daerah		Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Penanggung-jawab
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	5.05.01.2.02 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Penyelenggaraan Waidata Pendukung Statistik Sektoral	5.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terwujudnya tertib administrasi	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan	5.05.01.2.02 Administrasi	Kepala Subbagian Perencanaan,

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Penanggung-jawab
				dan pelaporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Keuangan Perangkat Daerah	Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah		2. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Penanggung-jawab
				Badan Riset dan Inovasi Daerah			
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	5.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbsis elektronik pada SKPD	5.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan	5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kepala Subbagian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Penanggung-jawab
				mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah	persentase aduan masyarakat kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Pemerintahan Daerah	Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah			Kapabilitas Inovasi		
			Terwujudnya penyelenggaraan riset daerah		1. Presentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Tersusunnya laporan kajian bidang penyelenggaraa	Persentase Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Penanggung-jawab
				n pemerintahan umum dan pengkajian peraturan	Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
				Tersusunnya kajian dalam bidang Sosial dan Kependudukan serta budaya Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosia	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
				Tersusunnya kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian pada bidang Perindustrian dan Perdagangan	5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			Terwujudnya penyelenggaraan inovasi daerah		2. Presentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	5.05.02.2 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Penanggung-jawab
				Bersifat Inovatif	Daerah yang Bersifat Inovatif	Daerah yang bersifat Inovatif	
				Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	

Perangkat Daerah BRIDA Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu penguatan riset dan inovasi daerah. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas BRIDA Kota Semarang Tahun 2025 - 2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	5.05.02 - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Brida Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3. berikut

Tabel 4. 3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH												
5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.798.592.019	100%	5.498.156.312	100%	6.121.303.809	100%	6.392.526.605	100%	6.442.346.379	100%	6.559.860.908
5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	64.380.000	100%	97.867.829	100%	108.959.926	100%	113.787.725	100%	114.674.522	100%	116.766.293
5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen												

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Perencanaan Perangkat Daerah												
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.650.000	1 dokumen	29.151.865	1 dokumen	32.455.866	1 dokumen	33.893.921	1 dokumen	34.158.071	1 dokumen	34.781.147
5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	1 dokumen	133.787	1 dokumen	148.950	1 dokumen	155.549	1 dokumen	156.762	1 dokumen	159.621
5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.100.000	1 dokumen	253.282	1 dokumen	281.988	1 dokumen	294.482	1 dokumen	296.777	1 dokumen	302.191
5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.080.000	1 dokumen	273.732	1 dokumen	304.756	1 dokumen	318.259	1 dokumen	320.739	1 dokumen	326.590
5.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD												
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2.450.000	1 dokumen	249.799	1 dokumen	278.111	1 dokumen	290.433	1 dokumen	292.697	1 dokumen	298.036

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD											
5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.600.000	4 dokumen	15.601.617	4 dokumen	17.369.866	4 dokumen	18.139.490	4 dokumen	18.280.859	4 dokumen	18.614.319
5.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah												
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	1 dokumen	52.203.747	1 dokumen	58.120.389	1 dokumen	60.695.591	1 dokumen	61.168.617	1 dokumen	62.284.389
5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.906.338.000	100%	4.728.432.734	100%	5.274.742.415	100%	5.506.874.281	100%	5.551.350.465	100%	5.656.260.571
5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.727.078.000	23 Orang/ bulan	4.662.122.663	23 Orang/ bulan	5.190.516.165	23 Orang/ bulan	5.420.497.612	23 Orang/ bulan	5.462.741.937	23 Orang/ bulan	5.562.387.548
5.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	178.200.000	4 dokumen	65.324.067	4 dokumen	83.128.493	4 dokumen	85.230.273	4 dokumen	87.453.198	4 dokumen	92.696.618
5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan												

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	300.000	1 laporan	328.668	1 laporan	365.919	1 laporan	382.132	1 laporan	385.110	1 laporan	392.135
5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	460.000	2 laporan	328.668	2 laporan	365.919	2 laporan	382.132	2 laporan	385.110	2 laporan	392.135
5.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	1 dokumen	328.668	1 dokumen	365.919	1 dokumen	382.132	1 dokumen	385.110	1 dokumen	392.135
5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	44.400.000	100%	15.324.899	100%	17.061.786	100%	17.817.759	100%	17.956.621	100%	18.284.167

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	N/A	50 orang	15.324.899	50 orang	17.061.786	50 orang	17.817.759	50 orang	17.956.621	50 orang	18.284.167
5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.129.884.460	100%	206.608.757	100%	230.025.284	100%	240.217.246	100%	242.089.365	100%	246.505.306
5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	88.670.000	5 paket	20.448.153	5 paket	22.765.696	5 paket	23.774.399	5 paket	23.959.683	5 paket	24.396.731
5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	49,250,000	7 Paket	38.137.796	7 Paket	42.460.240	7 Paket	44.341.568	7 Paket	44.687.142	7 Paket	45.502.278
5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36,886,450	15 Paket	25.865.587	15 Paket	28.797.129	15 Paket	30.073.072	15 Paket	30.307.445	15 Paket	30.860.281
5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20,000,000	5 Paket	10.514.946	5 Paket	11.706.684	5 Paket	12.225.384	5 Paket	12.320.661	5 Paket	12.545.402

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu												
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.950.000	4 laporan	44.882.866	4 laporan	49.969.779	4 laporan	52.183.841	4 laporan	52.590.533	4 laporan	53.549.834
5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	274.806.000	4 laporan	54.204.127	4 laporan	60.347.489	4 laporan	63.021.366	4 laporan	63.512.519	4 laporan	64.671.048
5.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbsis elektronik pada SKPD	627.322.010	1 dokumen	12.555.282	1 dokumen	13.978.267	1 dokumen	14.597.616	1 dokumen	14.711.382	1 dokumen	14.979.732
5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada BRIDA yang selesai ditindaklanjuti	75.068.990	100%	280.832.201	100%	302.260.274	100%	317.234.304	100%	318.147.963	100%	320.303.094
5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	6.180.000	4 laporan	6.686.407	4 laporan	7.444.228	4 laporan	7.774.067	4 laporan	7.834.654	4 laporan	7.977.565

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Disediakan											
5.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	87.015.490	4 laporan	94.145.794	4 laporan	104.816.046	4 laporan	109.460.237	4 laporan	110.313.309	4 laporan	112.325.529
5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 laporan	180.000.000	12 laporan	190.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000
5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan	158.569.738	100%	169.089.892	100%	188.254.124	100%	196.595.290	100%	198.127.443	100%	201.741.477
5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	40.000.000	1 unit	43.180.396	1 unit	48.074.356	1 unit	50.204.435	1 unit	50.595.700	1 unit	51.518.614

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pajaknya											
5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	118.569.738	7 unit	125.909.496	7 unit	140.179.768	7 unit	146.390.855	7 unit	147.531.743	7 unit	150.222.863
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
Terwujudnya Penyelenggaraan Riset Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	2.194.440.267	100%	2.714.548.665	100%	3.001.736.038	100%	3.126.733.351	100%	3.149.693.580	100%	3.203.852.009
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan												
Tersusunnya laporan kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pengkajian peraturan	Persentase Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	853.920.000	100%	579.814.541	100%	641.156.383	100%	667.855.208	100%	672.759.402	100%	684.327.383
5.05.02.2.02.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum												
Terlaksananya Fasilitasi,	Jumlah Laporan	853.920.000	5 dokumen	579.814.541	6 dokumen	641.156.383	6 dokumen	667.855.208	6 dokumen	672.759.402	6 dokumen	684.327.383

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum											
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependuduka												
Tersusunnya kajian dalam bidang Sosial dan Kependudukan serta budaya Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	377.878.903	100%	445.128.153	100%	492.220.764	100%	512.717.661	100%	516.482.649	100%	525.363.478
5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial												
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	377.878.903	4 dokumen	445.128.153	4 dokumen	492.220.764	5 dokumen	512.717.661	5 dokumen	516.482.649	5 dokumen	525.363.478
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												
Tersusunnya kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	962.641.364	100%	1.689.605.971	100%	1.868.358.891	100%	1.946.160.482	100%	1.960.451.529	100%	1.994.161.148
5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan												
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen hasil penelitian pada	589.353.882	11 dokumen	1.151.162.325	12 dokumen	1.272.950.262	13 dokumen	1.325.958.042	13 dokumen	1.335.694.818	13 dokumen	1.358.661.855

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Perindustrian dan Perdagangan	bidang Perindustrian dan Perdagangan											
5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum												
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	373.287.482	5 dokumen	538.443.646	5 dokumen	595.408.629	6 dokumen	620.202.440	6 dokumen	624.756.711	6 dokumen	635.499.293
Terwujudnya Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	2.622.042.222	100%	1.643.929.487	100%	1.817.850.034	100%	1.893.548.351	100%	1.907.453.058	100%	1.940.251.377
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi												
Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2.622.042.222	100%	1.643.929.487	100%	1.817.850.034	100%	1.893.548.351	100%	1.907.453.058	100%	1.940.251.377
5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi												
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.672.042.222	5 dokumen	1.209.313.789	5 dokumen	1.337.253.897	5 dokumen	1.392.939.387	5 dokumen	1.403.168.021	5 dokumen	1.427.295.248
5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif												
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	200.000.000	2 laporan	278.616.235	2 laporan	308.092.613	2 laporan	320.922.105	2 laporan	323.278.701	2 laporan	328.837.421

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024 (Rp.)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											
5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan												
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	400.000.000	1 laporan	89.003.779	1 laporan	98.419.990	1 laporan	102.518.363	1 laporan	103.271.176	1 laporan	105.046.905
5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual												
Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	350.000.000	1 laporan	66.995.684	1 laporan	74.083.534	1 laporan	77.168.496	1 laporan	77.735.160	1 laporan	79.071.803

Ket: Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja BRIDA Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama BRIDA Kota Semarang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	68	70,61	73,22	75,82	78,43	81,04	
2	Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	4,07	4,1	4,12	4,15	4,18	4,22	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci BRIDA Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2025	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	4,07	4,1	4,12	4,15	4,18	4,22	-
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	Impelementasi hasil riset ke dokumen perencanaan pembangunan
3	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	Mendorong ekosistem inovasi lintas OPD

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur BRIDA Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab BRIDA Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra BRIDA Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BRIDA Kota Semarang.

Permasalahan berkaitan urusan penelitian dan pengembangan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh BRIDA Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan BRIDA Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur BRIDA Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan BRIDA Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan penelitian dan pengembangan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis BRIDA Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

35. INSPEKTORAT

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah. setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang. jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik. nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang maka Inspektorat wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota. atas dasar tersebut maka Renstra Inspektorat Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur. serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini. maka Inspektorat Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140). yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7;
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 173);
29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugs dan Fungsi. Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 30);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi. Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Semarang adalah:
1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan

4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang. landasan hukum. maksud dan tujuan. serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan. Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi. tugas pokok dan fungsi Inspektorat. sumber daya. kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi. analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan. Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Inspektorat yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Inspektorat yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program. kegiatan. dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja. kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci. yang disertai kondisi awal kinerja. dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial. kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas. Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang. Tugas pokok dari Inspektorat Kota Semarang adalah membantu Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengawasan;
b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. perumusan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
d. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan;
e. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Inspektorat;
f. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
g. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota, Gubernur, dan /atau Menteri;
h. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
i. pelaksanaan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
j. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota;
k. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
l. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengawasan;
m. penyelenggaraan fasilitasi pengawasan;
n. penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat;
o. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pengawasan;
p. penyelenggaraan penilaian Kinerja Pegawai;
q. penyelenggaraan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Inspektorat Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Perencanaan;
   b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
   c. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu V; dan
8. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Semarang

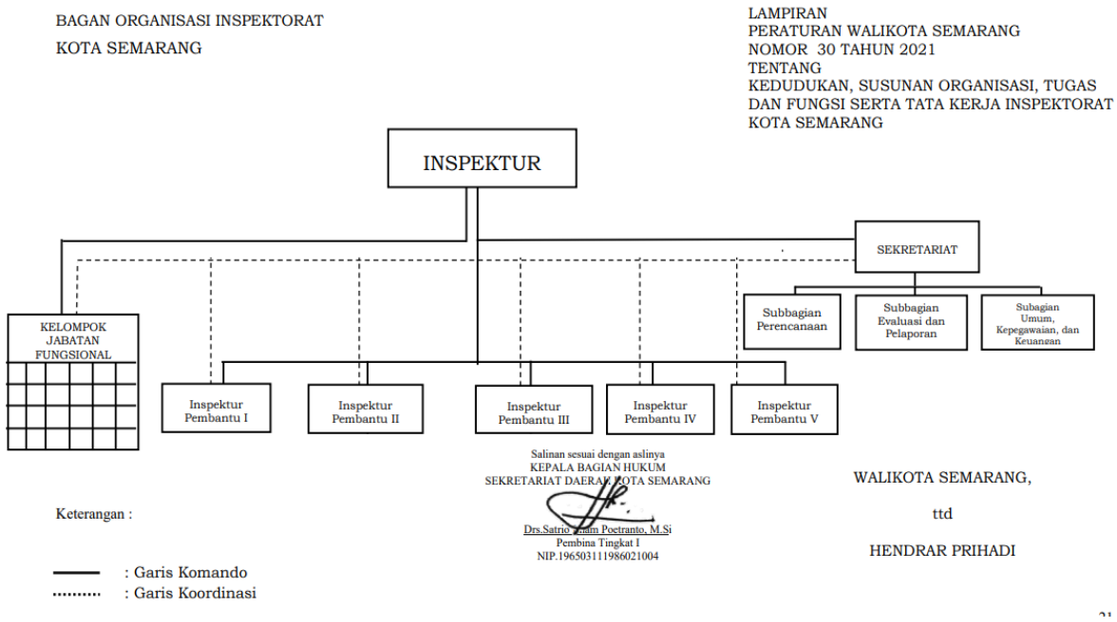

b. Uraian Tugas dan Jabatan Inspektorat Kota Semarang

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan di Inspektorat secara detail diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, serta mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas – tugas yang ada pada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V.

Untuk melaksanakan tugas. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan. serta memberikan bahan masukan evaluasi pelaksanaan pengawasan internal kepada inspektur;
g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi tugas - tugas Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V;
h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
i. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Subbagian Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, dan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;

j. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
k. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat;
m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Inspektorat;
p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Inspektorat;
q. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
r. pelaksanaan koordinasi pengawasan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
s. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat;
t. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia Inspektorat;
u. pelaksanaan tatakelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Inspektorat;
v. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik;
w. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Inspektorat;
x. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Standar Operasional Prosedur Inspektorat;
y. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Proses Bisnis Inspektorat;
z. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kelembagaan Inspektorat;
aa. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Inspektorat;
bb. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
cc. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
dd. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
ee. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Inspektorat;
ff. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Inspektorat;
gg. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
hh. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
ii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas merencanakan. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah Inspektur Pembantu I.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pemerintahan daerah;
b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
c. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;

e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
f. pelaksanaan kegiatan koordinasi tugas pejabat pengawasan di Inspektur Pembantu I dan antar Inspektur Pembantu;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
h. pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
i. pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
j. pelaksanaan pengawasan dokumen perencanaan di wilayah kerjanya;
k. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
l. pelaksanaan reviu Rencana Strategi;
m. pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. pelaksanaan reviu Rencana Kerja;
o. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
p. pelaksanaan reviu Realisasi Penyerapan Dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus;
q. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
r. pelaksanaan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
s. pelaksanakan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
t. pelaksanaan reviu pengawasan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
u. pelaksanaan reviu lain sesuai dengan ketentuan /atau perundang – undangan;
v. pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
w. pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah;
x. pelaksanaan pemeriksaan reguler atau audit operasional;
y. pelaksanaan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah;
z. pelaksanaan pemeriksaan serentak kas opname;
aa. pelaksanaan audit kinerja;
bb. pelaksanaan audit Anggaran Responsif Gender;
cc. pelaksanaan probity audit;
dd. pelaksanaan koordinasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah kerjanya;
ee. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di wilayah kerjanya;
ff. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
gg. pelaksanaan koordinasi pendampingan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
hh. pelaksanaan klarifikasi atas hasil-hasil pengawasan dengan obyek pemeriksaan yang diperiksa;
ii. pelaksanaan gelar kasus hasil pemeriksaan; dan
jj. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas merencanakan. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah Inspektur Pembantu II.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pemerintahan daerah;
b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
c. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
f. pelaksanaan kegiatan koordinasi tugas pejabat pengawasan di Inspektur Pembantu I dan antar Inspektur Pembantu;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
h. pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
i. pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
j. pelaksanaan pengawasan dokumen perencanaan di wilayah kerjanya;
k. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
l. pelaksanaan reviu Rencana Strategi;
m. pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. pelaksanaan reviu Rencana Kerja;
o. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
p. pelaksanaan reviu Realisasi Penyerapan Dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus;
q. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
r. pelaksanaan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
s. pelaksanakan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
t. pelaksanaan reviu pengawasan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
u. pelaksanaan reviu lain sesuai dengan ketentuan /atau perundang – undangan;
v. pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
w. pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah;
x. pelaksanaan pemeriksaan reguler atau audit operasional;
y. pelaksanaan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah;
z. pelaksanaan pemeriksaan serentak kas opname;
aa. pelaksanaan audit kinerja;
bb. pelaksanaan audit Anggaran Responsif Gender;
cc. pelaksanaan probity audit;
dd. pelaksanaan koordinasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah kerjanya;
ee. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di wilayah kerjanya;
ff. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
gg. pelaksanaan koordinasi pendampingan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
hh. pelaksanaan klarifikasi atas hasil-hasil pengawasan dengan obyek pemeriksaan yang diperiksa;
ii. pelaksanaan gelar kasus hasil pemeriksaan; dan
jj. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta

mengevaluasi tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah Inspektur Pembantu III.

Untuk melaksanakan tugas. Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pemerintahan daerah;
b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
c. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
f. pelaksanaan kegiatan koordinasi tugas pejabat pengawasan di Inspektur Pembantu I dan antar Inspektur Pembantu;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
h. pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
i. pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
j. pelaksanaan pengawasan dokumen perencanaan di wilayah kerjanya;
k. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
l. pelaksanaan reviu Rencana Strategi;
m. pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. pelaksanaan reviu Rencana Kerja;
o. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
p. pelaksanaan reviu Realisasi Penyerapan Dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus;
q. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
r. pelaksanaan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
s. pelaksanakan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
t. pelaksanaan reviu pengawasan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
u. pelaksanaan reviu lain sesuai dengan ketentuan /atau perundang – undangan;
v. pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
w. pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah;
x. pelaksanaan pemeriksaan reguler atau audit operasional;
y. pelaksanaan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah;
z. pelaksanaan pemeriksaan serentak kas opname;
aa. pelaksanaan audit kinerja;
bb. pelaksanaan audit Anggaran Responsif Gender;
cc. pelaksanaan probity audit;
dd. pelaksanaan koordinasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah kerjanya;
ee. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di wilayah kerjanya;
ff. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
gg. pelaksanaan koordinasi pendampingan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
hh. pelaksanaan klarifikasi atas hasil-hasil pengawasan dengan obyek pemeriksaan yang diperiksa;
ii. pelaksanaan gelar kasus hasil pemeriksaan; dan
jj. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah Inspektur Pembantu IV.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pemerintahan daerah;
b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
c. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
f. pelaksanaan kegiatan koordinasi tugas pejabat pengawasan di Inspektur Pembantu I dan antar Inspektur Pembantu;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
h. pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
i. pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
j. pelaksanaan pengawasan dokumen perencanaan di wilayah kerjanya;
k. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
l. pelaksanaan reviu Rencana Strategi;
m. pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. pelaksanaan reviu Rencana Kerja;
o. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
p. pelaksanaan reviu Realisasi Penyerapan Dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus;
q. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
r. pelaksanaan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
s. pelaksanakan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
t. pelaksanaan reviu pengawasan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
u. pelaksanaan reviu lain sesuai dengan ketentuan /atau perundang – undangan;
v. pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
w. pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah;
x. pelaksanaan pemeriksaan reguler atau audit operasional;
y. pelaksanaan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah;
z. pelaksanaan pemeriksaan serentak kas opname;
aa. pelaksanaan audit kinerja;
bb. pelaksanaan audit Anggaran Responsif Gender;
cc. pelaksanaan probity audit;
dd. pelaksanaan koordinasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah kerjanya;
ee. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di wilayah kerjanya;
ff. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
gg. pelaksanaan koordinasi pendampingan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
hh. pelaksanaan klarifikasi atas hasil-hasil pengawasan dengan obyek pemeriksaan yang diperiksa;

ii. pelaksanaan gelar kasus hasil pemeriksaan; dan
kk. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Inspektur Pembantu V

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di wilayah Inspektur Pembantu V.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pemerintahan daerah;
b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
c. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
f. pelaksanaan kegiatan koordinasi tugas pejabat pengawasan di Inspektur Pembantu V dan antar Inspektur Pembantu;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
h. pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
i. pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
j. pelaksanaan pengawasan dokumen perencanaan di wilayah kerjanya;
k. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
l. pelaksanaan reviu Rencana Strategi;
m. pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. pelaksanaan reviu Rencana Kerja;
o. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
p. pelaksanaan reviu Realisasi Penyerapan Dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus;
q. pelaksanaan reviu pengawasan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
r. pelaksanaan reviu lain sesuai dengan ketentuan /atau perundang – undangan;
s. pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
t. pelaksanaan pemeriksaan forensi atau audit operasional;
u. pelaksanaan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah;
v. pelaksanaan pemeriksaan serentak kas opname;
w. pelaksanaan audit kinerja;
x. pelaksanaan audit Anggaran Responsif Gender;
y. pelaksanaan probity audit;
z. pelaksanaan audit forensik;
aa. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
bb. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di wilayah kerjanya;
cc. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
dd. pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi;
ee. pelaksanaan klarifikasi awal atas pengaduan masyarakat;
ff. pelaksanaan klarifikasi atas hasil-hasil pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksanaan yang diperiksa;
gg. pelaksanaan gelar kasus hasil pemeriksaan; dan

hh. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pejabat fungsional pengawas berada dibawah inspektur pembantu.

2.1.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Semarang

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Inspektorat Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam klasifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan, serta klasifikasi jabatan. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	0	0	0	0	2	0	2
2	D3	6	13	0	0	0	0	19
3	S1	20	33	0	1	0	0	54
4	S2	2	6	0	0	0	0	8
5	S3	1	0	0	0	0	0	1

Sumber : Inspektorat Kota Semarang Bulan Agustus 2025

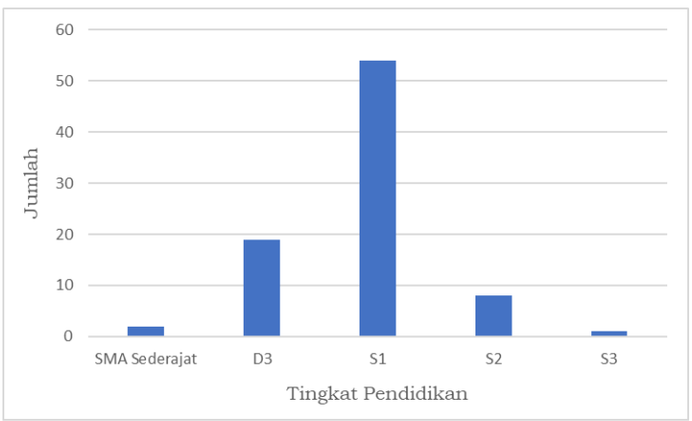

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 84 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P
1	**Golongan IV**	**6**	**7**
	IV/c	2	3
	IV/b	4	2
	IV/a	0	2
2	**Golongan III**	**17**	**33**
	III/d	3	6
	III/c	5	7
	III/b	3	11
	III/a	6	9
3	**Golongan II**	**6**	**12**
	II/d	6	9
	II/c	0	3
4	**PPPK**	0	1
5	**Non ASN**	2	0

Sumber : Inspektorat Kota Semarang Bulan Agustus 2025

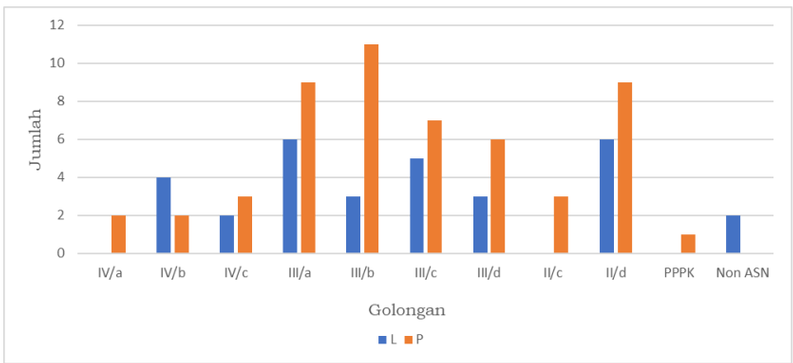

Gambar 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Inspektorat Kota Semarang

Komposisi pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan
di Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	**Jabatan Struktural**	**6**	**4**	**10**
2	**Jabatan Fungsional Auditor**	**17**	**32**	**49**
	Auditor Madya	0	1	**1**
	Auditor Muda	5	3	**8**
	Auditor Pertama	6	16	**22**
	Auditor Pelaksana	6	12	**18**
3	**Jabatan Fungsional PPUPD**	**6**	**12**	**18**
	PPUPD Madya	1	4	**5**
	PPUPD Muda	3	6	**9**
	PPUPD Pertama	2	2	**4**
4	**Jabatan Pelaksana**	**0**	**5**	**5**
5	**Non ASN**	**2**	**0**	**2**

Sumber : Inspektorat Kota Semarang Bulan Agustus 2025

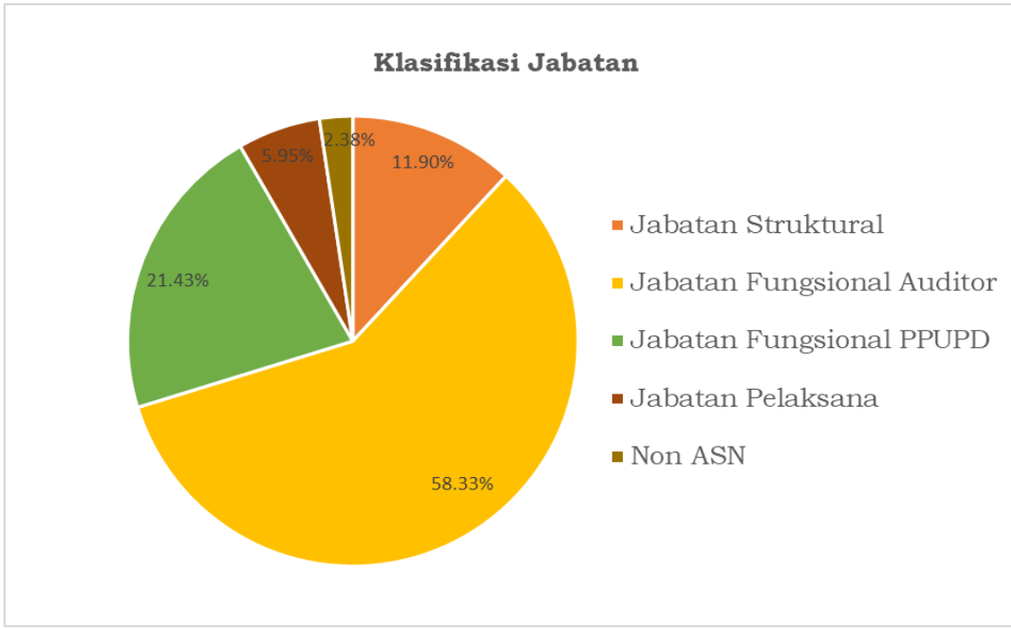

Gambar 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan
di Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Inspektorat Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana di Inspektorat Kota Semarang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan roda 4	12	-
2.	Kendaraan roda 2	41	
3.	Troli	1	
4.	Alat uji beton	1	
5.	Alat ukur jalan	5	
6.	*Digital multimeter*	11	
7.	*Server*	1	
8.	*Scanner*	12	
9.	Lemari penyimpan	4	
10.	Mesin ketik manual portable	6	Diusulkan untuk dihapuskan
11.	Mesin ketik elektrik	1	
12.	Mesin stensil	1	
13.	Mesin fotokopi	5	1 diusulkan untuk dihapuskan
14.	Lemari besi/metal	3	
15.	Lemari kayu (lemari dapur)	1	Dropping dari Distaru
16.	Rak besi	17	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
17.	Rak kayu	9	1 dropping dari Distaru
18.	Filling cabinet besi	5	
19.	Lemari kaca	4	
20.	Brankas	1	
21.	CCTV	3	1 server. 1 dropping dari Distaru
22.	Alat penghancur kertas	6	
23.	Alat pemotong kertas	1	
24.	LCD projector/Infocus	4	
25.	Fingerprint	1	Hibah dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
26.	Speaker	1	
27.	Papan nama	1	
28.	Meja kerja besi	2	
29.	Meja kerja kayu	27	
30.	Meja resepsionis	1	
31.	Kursi besi/metal	10	
32.	Kursi kayu	4	
33.	Meja rapat	6	
34.	Meja makan kayu	2	
35.	Kursi rapat	120	
36.	Meja komputer	10	
37.	Nakas	1	
38.	Sofa	13	3 dropping dari Distaru
39.	Set meja kursi baca perpustakaan	1	
40.	Alat pengukur waktu (LCD)	1	
41.	Lemari es	4	
42.	AC central	14	
43.	AC window	7	
44.	AC split	21	
45.	Kipas angin	4	
46.	Kitchen set	2	
47.	Meja pantry	1	
48.	Televisi	6	
49.	Camera video (pen camera. dan kamera SLR)	3	
50.	Tustel (kamera digital)	1	
51.	Dispenser	2	
52.	Handycam (intercom)	1	
53.	Karpet	1	Dropping dari Distaru

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
54.	Tempat sampah	2	
55.	Meja kerja	73	
56.	Meja rapat pejabat eselon II	1	Dropping dari Distaru
57.	Meja tamu ruangan tunggu pejabat eselon III	1	
58.	Meja tamu biasa	1	Dropping dari Distaru
59.	Kursi kerja pejabat eselon II	2	1 Dropping dari Distaru
60.	Kursi kerja pejabat eselon III	18	1 Dropping dari Distaru
61.	Kursi kerja pejabat eselon IV	4	
62.	Kursi kerja pegawai non struktural	53	
63.	Kursi rapat ruang rapat pejabat eselon II	1	Dropping dari Distaru
64.	Kursi rapat ruang rapat pejabat eselon III	13	
65.	Kursi rapat pejabat lainnya	19	
66.	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon II	1	Dropping dari Distaru
67.	Kursi hadap depan meja pejabat eselon III	1	Dropping dari Distaru
68.	Lemari arsip	6	
69.	Audio tape reel recorder/Tape recorder	1	
70.	Audio cassette recorder	1	
71.	Digital audio tape recorder	1	
72.	Voice recorder	1	
73.	Focus bracket	1	
74.	Video tape recorder portable	1	
75.	Telerecorder	4	
76.	Layar film/projector	2	
77.	Clip on microphone	1	
78.	Camera conference	4	
79.	Alat studio lain	4	
80.	Pesawat telepon	3	2 dropping dari Distaru
81.	HT	2	
82.	Facsimili	2	
83.	Switcher/patch panel	1	Dropping dari Distaru
84.	Vacum cleaner	1	
85.	Hammer test	1	
86.	Standing thermometer	1	
87.	Alat pemeriksa beton	1	
88.	TV monitor	2	
89.	Exhaust fan	1	Dropping dari Distaru
90.	Microwave oven	1	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
91.	Stabilizer/UPS	2	Dropping dari Distaru
92.	Alat ukur/meteran	5	
93.	Fire extinguisher/alat pemadam kebakaran	1	Dropping dari Distaru
94.	Automatic dispenser	2	
95.	Backgroud/backdrop	2	Dropping dari Distaru
96.	PC Unit/komputer	33	
97.	Laptop	47	
98.	Notebook	22	
99.	CPU (peralatan mainframe)	3	
100.	Hard disk	3	
101.	CPU	5	
102.	CPU (server)	1	
103.	Printer	68	3 diusulkan untuk dihapuskan
104.	Air purifier	1	

Sumber Data : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Inspektorat Kota Semarang tidak memiliki aset tanah serta gedung dan bangunan. Gedung dan Bangunan yang saat ini ditempati merupakan aset dari Sekretariat Daerah Kota Semarang.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Semarang

a. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Inspektorat Kota Semarang yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
2	Nilai Maturitas SPIP	Nilai			3	3	2.7	2.8	2.9	3	3	3.012	3.086	3.158	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penerapan Manajemen Risiko lndeks	lndeks			N/A	N/A	2.2	2.6	3	1.57	2.025	2.82	2.86	2.991			100%	100%	99,70%
4	Level Kapabilitas APIP	Level			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
5	Indeks Integritas (SPI)	Nilai	IKK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78.27	74.1	74.8	71.6					

Keterangan:

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Kinerja inspektorat dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Berdasarkan hasil penilaian cepat BPKP tahun 2024. nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Semarang sebesar 3.158. Hasil tersebut berada dalam level 3 (terdefinisi) dalam arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif. Dengan nilai maturitas SPIP sebesar 3.158 berarti capaian kinerja terhadap target tahun 2024 sebesar 103.20%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 2.33%. sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2022. terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 4.85%. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kota Semarang untuk meningkatkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP antara lain dengan sosialisasi kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan bimbingan teknis kepada tim penjaminan kualitas dari Inspektorat Kota Semarang.

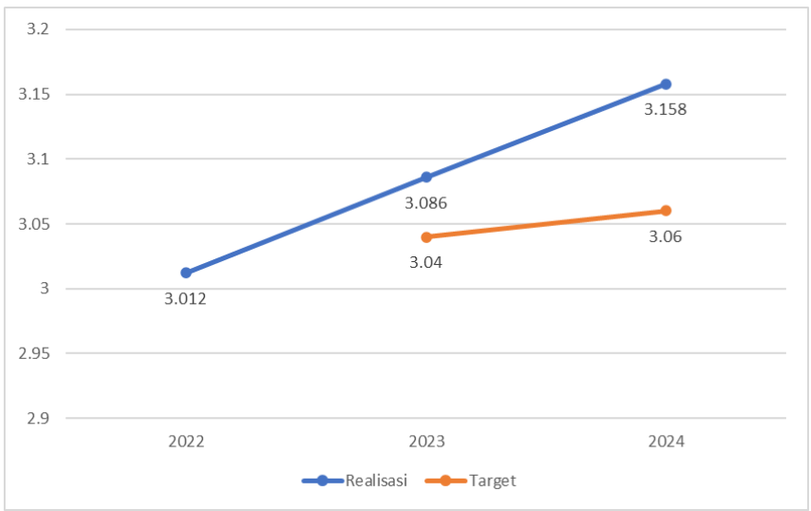

Gambar 2.5 Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kota Semarang

2. Level Kapabilitas APIP

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas (PK) BPKP tahun 2024 atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kota Semarang diperoleh skor 3 atau berada pada level 3 (“delivered”). Level delivered dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini. hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (ekonomis. efisien. efektif). peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko. serta perbaikan tata kelola bagi organisasi. Dengan kapabilitas APIP pada level 3 maka capaian kinerja tahun 2024 Inspektorat Kota Semarang sesuai target tahun 2024 sehingga memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 capaiannya adalah tetap.

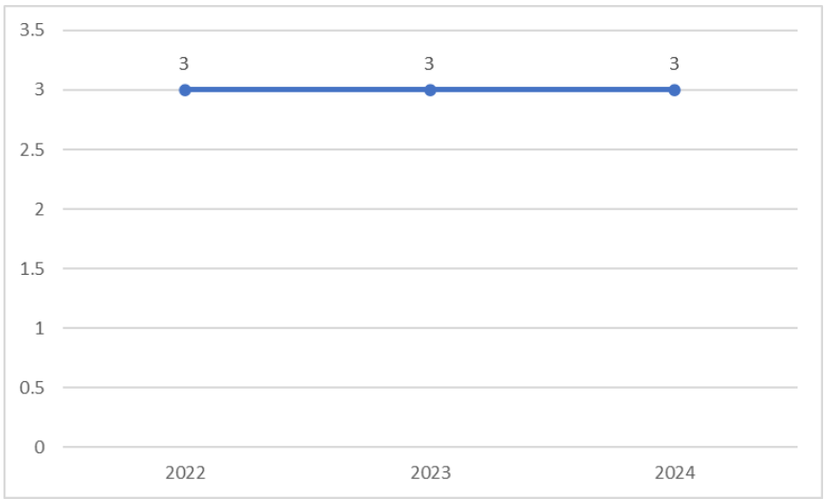

Gambar 2.6 Level Kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2022-2024

3. Nilai Penerapan Manajemen Risiko Indeks

Berdasarkan berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/LHP-632/PW11/3.2/2024 tanggal 23 Desember 2024 hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024. Penerapan Manajemen Risiko Indeks Pemerintah Kota Semarang sebesar 2.991 masih dalam level 2 (berkembang). Dibandingkan target tahun 2024. tingkat capaian manajemen risiko tahun 2024 sebesar 99.70%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023. capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4.58%. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kota Semarang untuk meningkatkan manajemen risiko indeks antara lain dengan sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

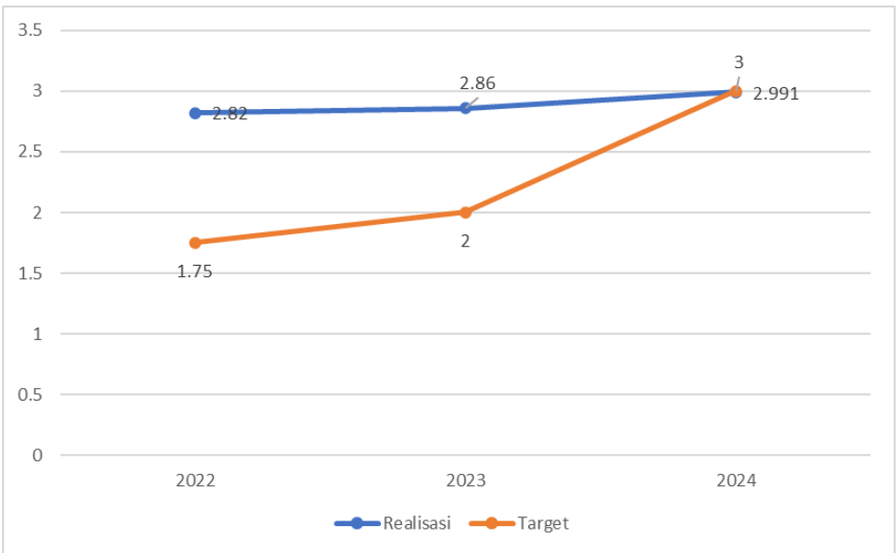

Gambar 2.7 Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kota Semarang Tahun 2022-2024

4. Indeks Integritas (SPI)

Indeks Integritas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Semarang pada periode tahun 2022 berada pada angka 74.1. Nilai ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 74.8. yang menunjukkan

adanya perbaikan dan penguatan dalam tata kelola integritas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Namun demikian. pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 71.6. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan integritas. baik dari aspek pencegahan praktik korupsi. penguatan pengawasan internal. maupun dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik.

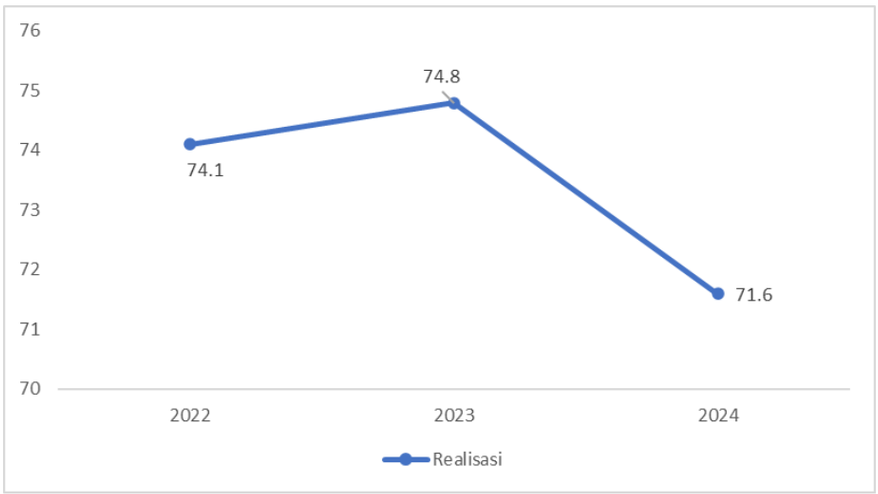

Gambar 2.8 Indeks Integritas (Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Semarang Tahun 2022-2024

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Kota Semarang

Pada tahun 2024 total alokasi anggaran sebesar Rp 27.048.125.782.00 dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 19.351.097.758.00; Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp 3.560.560.806.00; dan Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp4.136.467.218.00. Realisasi anggaran Inspektorat Kota Semarang tahun 2023 sebesar Rp23.664.325.950.00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 27.048.125.782.00 atau sebesar 87.49%. dengan perincian Program Penyelenggaraan Pengawasan capaian realisasi keuangan sebesar Rp2.497.415.248.00 dari alokasi anggaran sebesar Rp3.560.560.806.00 atau sebesar 70.14%; Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi capaian realisasi keuangan sebesar Rp4.136.467.218.00 dari alokasi anggaran sebesar Rp3.654.373.442.00 atau sebesar 88.35%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi Rp17.512.537.260.00 dari alokasi anggaran sebesar Rp19.351.097.758.00 atau sebesar 90.50%. Sementara itu pada tahun 2023 Inspektorat Kota Semarang penggunaan anggaran sebesar 84.84%. dengan perincian Program Penyelenggaraan Pengawasan capaian realisasi keuangan sebesar Rp2.148.582.259.00 dari alokasi anggaran sebesar Rp2.712.407.863.00 atau sebesar 79.21%; Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi capaian realisasi keuangan sebesar 3.419.664.440.00 dari alokasi anggaran sebesar Rp4.669.415.600.00 atau sebesar 73.24%; dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp17.334.487.797.00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 19.612.914.971.00 atau sebesar 88.38%.

Perkembangan anggaran dan realisasi anggaran Inspektorat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Semarang

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Pengawasan	N/A	2.058.264.165	2.829.660.908	2.712.407.863	3.560.560.806	N/A	1.128.100.107	1.992.759.974	2.148.582.259	2.497.415.248	N/A	54.81 %	70.42 %	79.21 %	70.14 %	21.53%	33.57%
Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	N/A	1.841.838.110	3.131.136.657	4.669.415.600	4.136.467.218	N/A	1.151.078.304	2.294.276.406	3.419.664.440	3.654.373.442	N/A	62.50 %	73.27 %	73.24 %	88.35 %	35.91%	51.74%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	19.038.994.008	17.097.304.312	19.612.914.971	19.351.097.758	N/A	15.278.557.562	14.571.651.531	17.334.487.797	17.512.537.260	N/A	80.25 %	85.23 %	88.38 %	90.50 %	1.06%	5.12%

Keterangan:

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/RealisasiTahun N-1}}$

c. Mitra Inspektorat dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Inspektorat Kota Semarang dalam pemberian pelayanan antara lain :

1. OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Sebanayak 51 OPD menjadi mitra layanan pengawasan. *quality assurance* dan consulting oleh Inspektorat.

2. Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

3. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan mitra strategis bagi Inspektorat Kota Semarang dalam bidang pembinaan. supervisi. dan koordinasi pengawasan. Kerja sama ini bertujuan memperkuat kapasitas pengawasan. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Semarang yang transparan. akuntabel. dan berintegritas.

4. Inspektorat Jenderal Kementrian

Inspektorat Jenderal Kementerian berperan sebagai mitra pengawasan bagi Inspektorat Kota Semarang dalam lingkup nasional. Sinergi ini terwujud melalui pembinaan. supervisi. serta evaluasi pelaksanaan pengawasan internal di daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

5. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK merupakan mitra strategis Inspektorat Kota Semarang dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui hasil pemeriksaan yang obyektif dan independen. BPK memberikan masukan serta rekomendasi yang menjadi dasar bagi Inspektorat untuk melakukan pembinaan. pengawasan. dan perbaikan tata kelola keuangan serta kinerja perangkat daerah.

Sinergi ini memastikan setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara tepat. sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang transparan. akuntabel. dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Kerja sama yang terjalin dengan baik antara BPK dan Inspektorat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. efektif. dan dipercaya masyarakat.

6. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

BPKP merupakan mitra penting Inspektorat Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah di tingkat nasional. BPKP memberikan asistensi. bimbingan teknis. supervisi. serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat. khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan. program. dan kinerja. Melalui kerja sama ini. Inspektorat memperoleh dukungan untuk memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian intern. dan memastikan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan berjalan efektif. Sinergi antara BPKP dan Inspektorat berkontribusi langsung pada peningkatan transparansi. akuntabilitas. dan efektivitas pelayanan publik di Kota Semarang.

7. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

KPK merupakan mitra strategis Inspektorat Kota Semarang dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui program. koordinasi. dan

supervisi yang dilaksanakan KPK. Inspektorat memperoleh dukungan dalam meningkatkan integritas. memperbaiki sistem. serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

8. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian. Kejaksaan)

Pemerintah Kota Semarang menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam rangka koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergisitas kerja sama diantara para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif. efisien. dan akuntabel.

d. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat

Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Perhimpunan Pattiro Semarang.

Maksud dari Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi para pihak untuk melakukakan kolaborasi pengawasan pengadaan barang / jasa Pemerintah di Kota Semarang. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengawasan yang optimal oleh para pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing terhadap tata Kelola dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kota Semarang agar berjalan secara efektif. efisien. transparan. terbuka. adil. bersaing. dan akuntabel.

e. Inovasi Inspektorat

1. Aplikasi SIMWAS (Sistem Manajemen Informasi Pengawasan)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. akuntabel. dan berbasis teknologi informasi. Inspektorat Kota Semarang mengembangkan inovasi berupa Aplikasi SIMWAS (Sistem Manajemen Informasi Pengawasan). Aplikasi berbasis web ini merupakan sistem manajemen pelaksanaan yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan. pendahuluan. pelaksanaan. pelaporan. dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. SIMWAS dapat digunakan sebagai berikut:

a) Alat bantu mengarahkan dan monitoring proses pengawasan;
b) Alat bantu dokumentasi proses dan hasil pengawasan;
c) Alat bantu dokumentasi proses dan hasil kendali mutu pengawasan;
d) Alat bantu penilaian kinerja individu.

SIMWAS memiliki manfaat antara lain:

a) Proses Perencanaan lebih cepat dan dapat terdokumentasi dengan baik (sesuai standar audit)
b) Dalam proses perencanaan. reviu laporan. reviu KKA. tidak tergantung keberadaan pejabat (Dalnis. Irban. Inspektur)
c) Menghemat biaya ATK. proses paperless
d) Mendukung SPBE dalam bidang pengawasan
e) Meningkatkan akuntabilitas kinerja individu. tim. dan Lembaga
f) Menjamin keselarasan antara tujuan pengawasan. langkah kerja. laporan. temuan dan tindak lanjut (efektivitas alur kerja)
g) Akurasi data : data terintegrasi dan up to date. dapat diandalkan dgn informasi akurat utk pengambilan keputusan
h) Memudahkan dalam melakukan Monitoring

Dengan adanya SIMWAS. proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih efektif. cepat. dan mudah diakses oleh pihak terkait. Inovasi ini sekaligus

meminimalkan risiko kehilangan dokumen. memperkuat akuntabilitas kinerja. serta mendukung terwujudnya pengawasan yang modern dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik.

2. EVASAKTI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Inspektorat Kota Semarang mengembangkan sistem Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis Teknologi Informasi (EVASAKTI). sebuah platform digital yang digunakan oleh Inspektorat Kota Semarang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah melalui aplikasi berbasis web yaitu e.sakip.

3. LOPISSEMAR

LOPISSEMAR (Laporan dan Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang) adalah layanan pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Kota Semarang bagi pegawai yang memiliki informasi dan ingin melaporkan dugaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara online.

4. APLIKASI LUGAS

Inovasi Layanan Surat Tugas Terintegrasi “LUGAS” memberikan dampak yang signifkan yaitu:

a) Menghapus tata kerja manual yang berdampak inefsiensi dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara.
b) Meningkatkan keamanan dan ketepatan data yang dihasilkan
c) Meningkatkan jaminan pengelolaan data surat tugas berjangka panjang (bisa menyimpan data sampai dengan 10 tahun).
d) Menurunkan jumlah sampah kertas yang dihasilkan dari proses pembuatan surat tugas (dari 40 lembar perbulan menjadi 10 lembar perbulan).
e) Meningkatkan ketepatan pembuatan konsep surat. dari penulisan kelengkapan data pegawai mulai nama. nip dan sebagainya.
f) Meningkatkan kepatuhan pegawai atas kelengkapan pertanggungjawaban dokumen kelengkapan surat tugas seperti sertifkat. dan lainnya.
g) Meningkatkan indeks kepuasan pengguna pengelolaan surat tugas. Kelebihan inovasi ini adalah mampu membangun konsep satu data yang terintegrasi dan ramah lingkungan.

f. Penghargaan Inspektorat

Pemerintah Kota Semarang mendapatkan Peringkat 1 Nasional dari tahun 2022. 2023. dan 2024 atas penilaian tahun sebelumnya dalam Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Kategori Pemerintah Kota yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya. teridentifikasi tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Semarang sebagai berikut:

1. Tuntutan terhadap Inspektorat untuk bisa berperan sebagai sebagai *quality assurance* yang mampu bertindak sebagai e*arly warning system* bagi Pemerintah Kota Semarang.

2. Beban kerja inspektorat Kota Semarang yang besar. sementara kuantitas dan kualitas SDM kurang belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana hasil perhitungan dalam analisis beban kerja.
3. Pemahaman dan kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan maturitas penyelenggaraan SPIP. pengelolaan risiko. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal. serta pengendalian korupsi belum optimal.
4. Berbagai macam mandatory yang harus di penuhi oleh Inspektorat yang disamping tugas pokok.
5. Tekanan eksternal yang mengganggu independensi Inspektorat

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Inspektorat Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Amanat peraturan perundang-undangan yang memberikan pengalokasian anggaran untuk inspektorat. Mulai Tahun Anggaran 2020. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal atau inspektorat di Pemerintah Daerah. Pemerintah kabupaten/kota untuk APBD sampai dengan Rp1 triliun setidaknya dialokasikan 1 persen untuk pengawasan. Kabupaten/kota dengan APBD di atas Rp1 triliun sampai dengan Rp2 triliun maka anggaran pengawasan minimal 0.75 persen dari total belanja. Untuk daerah dengan APBD di atas Rp2 triliun maka sekurang-kurangnya 0.5 persen dari total belanja untuk pengawasan.
2. Adanya penugasan mandatory kepada Inspektorat dalam pencegahan korupsi. dan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Adanya kerjasama dengan BPK dan BPKP. Kepolisian. dan Kejaksaan dalam upaya penanganan pengaduan masyarakat. peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. pengelolaan manajemen risiko. dan pengendalian korupsi
4. Peluang Peningkatan Kompetensi SDM. tersedianya berbagai program sertifikasi dan pelatihan teknis. baik dari instansi pusat maupun kerja sama dengan lembaga profesional. memberikan kesempatan bagi peningkatan kompetensi auditor.
5. Dukungan regulasi dalam penguatan peran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran. perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu. kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Inspektorat Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Inspektorat Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Inspektorat Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Inspektorat Kota Semarang. maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Kota Semarang yaitu: "Belum Optimalnya Penerapan Pengendalian Internal Pemerintah" yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rumusan Permasalahan
"Belum Optimalnya Penerapan Pengendalian Internal Pemerintah"

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya peran pengawasan. pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko	Masih rendahnya upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan	• Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal oleh perangkat daerah. • Belum optimalnya Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) yang dapat menunjang peningkatan kinerja pengawasan. • Laporan hasil pemeriksaan belum seragam. • Pelaksanaan fungsi pengawasan yang belum efektif (masih tumpang tindih waktunya. kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan kurang).
		Penerapan Manajemen Risiko yang belum menyeluruh di PD	• Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko • OPD belum menyusun register resiko yang memadai
		Belum optimalnya pengendalian korupsi	• Masih rendahnya penerapan nilai integritas ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. • Belum efektifnya pengendalian korupsi. baik dalam pengelolaan risiko korupsi. penerapan strategi pencegahan korupsi. dan penanganan kejadian korupsi. • Belum optimalnya Pendampingan dan fasilitasi perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan
2	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat	• Pengumpulan data capaian tidak akurat • Belum adanya database internal untuk integrasi perencanaan dan evaluasi kinerja dan keuangan

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat	• Sarana prasarana pendukung belum memadai • Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding jumlah obyek pemeriksaan dan tugas-tugas pengawasan. baik yang sifatnya mandatory. perintah pimpinan maupun tugas-tugas lainnya dengan rentang waktu yang terbatas. • Kompetensi SDM pengawasan yang belum merata dan memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan. • Kualitas pelayanan belum sepenuhnya memenuhi harapan pemangku kepentingan

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. terdapat tantangan pembangunan sebagai berikut:

1. Rendahnya produktivitas
2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pergeseran struktur kelas masyarakat
4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif
5. Krisis lingkungan
6. Geopolitik dan geoekonomi
7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah

Adapun tantangan pembangunan yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029 diantaranya adalah “Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah”. Dalam menghadapi tantangan pembangunan tersebut Inspektorat melakukan pengendalian dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

b. Telaahan Visi. Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dengan mempertimbangkan potensi. kondisi. permasalahan. tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen

perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju. Berkeadilan Sosial. Lestari dan Inklusif."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbeda dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
2. Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak.
4. Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital.
5. Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat.
7. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

Sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang pada RPJMD 2025-2029, maka lnspektorat Kota Semarang ingin berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, khususnya misi ketujuh yaitu, **"Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas"**. dengan pernyataan Tujuannya adalah **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat".** Dan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu. **"Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil.**

Sasaran tersebut dapat dinilai pencapaiannya melalui alat ukuran (indikator). Salah satu indikator yang secara langsung terkait dengan Inspektorat Kota Semarang yaitu Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

c. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah. untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif" dan "Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis".

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Inspektorat Kota Semarang tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan. perkiraan kebutuhan pelayanan. dan prioritas wilayah pelayanan Inspektorat Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Inspektorat Kota Semarang tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Inspektorat terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Inspektorat Kota Semarang

TEMA ISU	ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. demokratis. dan bertanggung jawab	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

Tabel 2.9 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 Inspektorat

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	4	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi - Perkuatan penerapan manajemen anti

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
								suap di pemerintah dan sektor swasta - Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi - Pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi dan berbasis elektronik - Edukasi melalui kampanye dan sosialisasi secara reguler tentang budaya anti korupsi untuk ASN - Koordinasi. monitoring dan evaluasi serta dukungan verifikasi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi - Peningkatan integritas dan kompetensi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang 2025

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Inspektorat

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN Tahun 2025-2029, Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 2.10 Isu Perangkat Daerah Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	**Permasalahan PD**	**Isu KLHS yang Relevan dengan PD**	**Isu Lingkungan Dinamis**			**Isu Startegis PD**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
- Penguatan pengawasan internal pemerintah - Peningkatan upaya pencegahan korupsi - Tata Kelola pemerintahan yang baik	- Masih rendahnya upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan - Penerapan Manajemen Risiko yang belum menyeluruh di PD - Belum optimalnya pengendalian korupsi - Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat - Belum optimalnya kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	- Perkembangan Teknologi - Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	- Peningkatan peran Inspektorat sebagai *early warning system* dalam mendeteksi penyimpangan - Pengawasan bermanfaat memberikan alternatif untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah

Isu Inspektorat Kota Semarang dengan Peningkatan peran Inspektorat sebagai *early warning system* memiliki potensi keberhasilan yang tinggi karena dapat memperkuat fungsi pengawasan internal secara lebih proaktif dan preventif. Dengan sistem deteksi dini, penyimpangan dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi permasalahan besar yang merugikan organisasi maupun keuangan negara/daerah. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Keberhasilan juga ditopang oleh adanya regulasi yang mendukung penerapan teknologi informasi pengawasan, kompetensi auditor yang mumpuni, serta komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi

Inspektorat. Jika seluruh faktor tersebut berjalan sinergis, Inspektorat dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga integritas dan mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan.

Upaya peningkatan peran Inspektorat sebagai *early warning system* berpotensi mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta kurangnya independensi Inspektorat dapat melemahkan efektivitas deteksi dini. Selain itu. budaya organisasi yang masih permisif terhadap penyimpangan dan rendahnya koordinasi antarunit kerja dapat membuat rekomendasi Inspektorat diabaikan. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka fungsi pengawasan cenderung bersifat administratif dan reaktif, bukan preventif, sehingga penyimpangan tetap sulit dicegah sejak dini.

Pengawasan yang dilaksanakan secara obyektif dan konstruktif berpotensi berhasil menjadi instrumen penting dalam memberikan masukan bagi Kepala Daerah. Hasil pengawasan yang berkualitas dapat menghadirkan rekomendasi berbasis data, analisis risiko, serta evaluasi kinerja program, sehingga menjadi alternatif yang relevan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Keberhasilan ini semakin besar apabila Inspektorat mampu menjaga independensi, meningkatkan kompetensi auditor, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan laporan yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Dengan demikian. Kepala Daerah dapat memperoleh pertimbangan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas program, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan berpotensi gagal memberikan manfaat apabila rekomendasi yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah atau perangkat daerah karena dianggap kurang relevan, lambat, atau tidak berbasis data yang kuat. Kegagalan juga dapat muncul jika Inspektorat tidak memiliki independensi yang memadai, kualitas laporan kurang komprehensif, atau komunikasi hasil pengawasan tidak efektif. Selain itu. rendahnya kapasitas sumber daya manusia serta keterbatasan pemanfaatan teknologi dapat membuat hasil pengawasan bersifat administratif semata. sehingga tidak mampu memberikan alternatif yang strategis dalam kebijakan maupun pengambilan keputusan Kepala Daerah.

BAB III
TUJUAN. SASARAN. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa visi dan misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Wali Kota Semarang yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Inspektorat Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang.

Visi Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025 – 2029. yaitu :

"**Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari Dan Inklusif**"

Dengan menjalankan 7 (tujuh) Misi. yaitu :

1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Toleran dan Berbudaya dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi;
3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, dan Papan yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup yang Layak;
4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital. Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global;
5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas. Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan;
6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat; dan
7. **Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.**

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. telah dilakukan telaah terhadap misi. Tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam

RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut. dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Semarang mendukung **Tujuan Ke-7 Pemerintah Kota Semarang** yaitu **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat"** dengan Indikator Tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi". Demi mewujudkan tujuan tersebut Inspektorat Kota Semarang juga mendukung pencapaian **Sasaran Ke-17 Pemerintah Kota Semarang** yaitu **"Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil"** dengan Indikator Sasaran "Indeks Integritas Nasional".

Dalam kerangka tersebut. selaras dengan keberadaan Inspektorat sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan serta menjadi *Quality Assurance* dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih.

Prioritas dalam peningkatan pengawasan pelaksanaan pemerintah antara lain adalah peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan Kapabilitas APIP. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Wali Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing melalui pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Semarang

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Inspektorat Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Inspektorat Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi pada bidang pengawasan untuk meningkatan pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Inspektorat Kota Semarang.

Dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029. yaitu: **"Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah"**.
Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. maka ditetapkan indikator tujuan dari Inspektorat Kota Semarang. yaitu **"Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)"**. Indikator ini diukur berdasarkan hasil *Quality Assurance* yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjabarkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa fokus penilaian adalah tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur berikut ini:

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
b. Manajemen Risiko Indeks (MRI);
c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
d. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Ada 5 tingkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang penentuannya berdasarkan skor hasil penilaian dan dengan karakteristik sebagai berikut :

Gambar 3.1 Karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP

OPTIMUM (Level 5) Interval Skor : **≥ 4.50**	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi
TERKELOLA & TERUKUR (Level 4) Interval Skor : **4.00 ≤ skor < 4.50**	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi
TERDEFINISI (Level 3) Interval Skor : **3.00 ≤ skor < 4.00**	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif
BERKEMBANG (Level 2) Interval Skor : **2.00 ≤ skor < 3.00**	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum mampu relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
RINTISAN (Level 1) Interval Skor : **1.00 ≤ skor < 2.00**	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya

Sumber : Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

Penjelasan atas karakteristik dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Rintisan

Tingkat maturitas “Rintisan” dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat. tugas. dan fungsinya. serta belum dapat merumuskan indikator kinerja. target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik. Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif. pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal. tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang tinggi. serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi.

b. Tingkat Berkembang

Tingkat maturitas “Berkembang” dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat. tugas dan

fungsi organisasi. dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian. organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian. namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif. pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal. ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

c. Tingkat Terdefinisi

Tingkat maturitas "Terdefinisi" menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja. tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian. belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

d. Tingkat Terkelola dan Terukur

Tingkat maturitas "Terkelola dan Terukur" dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP "terkelola dan terukur" telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

e. Tingkat Optimum

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang "Optimum" menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Inspektorat Kota Semarang tersebut. perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang, dimana Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah.

Berdasarkan amanat pada pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 bahwa Setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansinya masing-masing setiap tahun dan amanat dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat maka ditetapkan Sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Meningkatnya peran pengawasan. pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko**, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menurut pasal 1 peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah adalah kemampuan Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Selanjutnya pada pasal 1 peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah juga dijabarkan bahwa Penilaian Kapabilitas Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh Pengawas Intern Pemerintah berupa penilaian mandiri. evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP oleh BPKP.

Penilaian dilakukan pada 6 (enam) elemen. sebagai berikut:

1) Peran dan Layanan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah;
2) Pengelolaan SDM;
3) Praktik Profesional;
4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5) Budaya dan Hubungan Organisasi; dan
6) Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP. yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu:

Gambar 3.2 Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

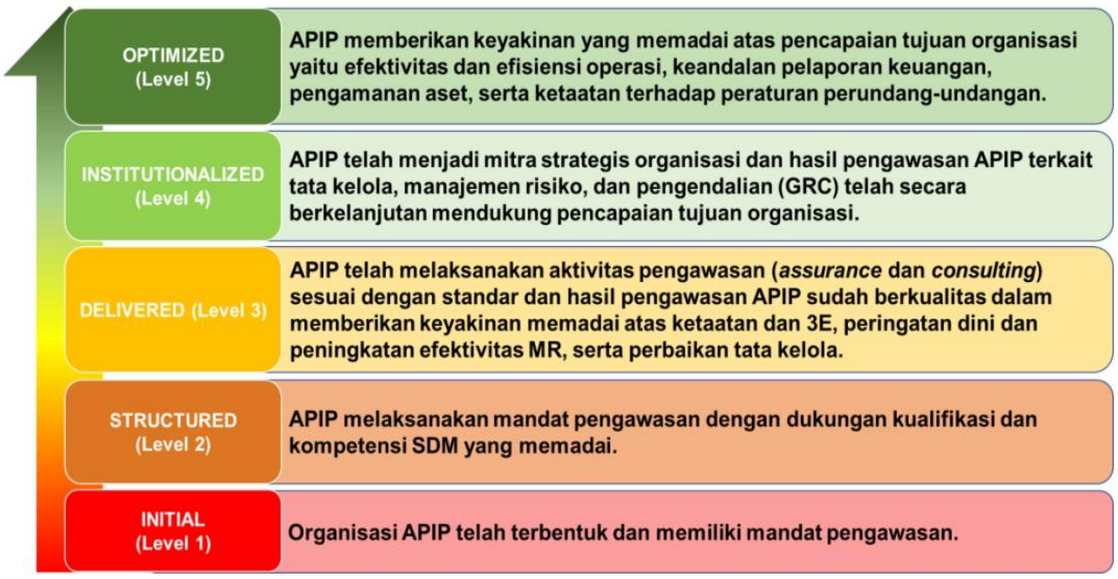

Sumber : Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

Dengan karakteristik masing-masing level berikut ini :

a. Level 1 *Initial*

Level *initial* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern. Kondisi tersebut menjadi landasan bagi APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai.

b. Level 2 *Structured*

Level *structured* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun. aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan.

c. Level 3 *Delivered*

Level *delivered* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

d. Level 4 *Institutionalized*

Level *institutionalized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D. Selain itu. hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi K/L/D.

e. Level 5 *Optimized*

Level *optimized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI menurut pasal 1 Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021 adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

Parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

1) Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

2) Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

a) Kepemimpinan
   Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko.
b) Kebijakan manajemen risiko
   Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya.
c) Sumber Daya Manusia
   Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;
d) Kemitraan
   Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;
e) Proses pengelolaan risiko
   Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan K/L/D dalam pengelolaan risiko.

3) Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area. sebagai berikut:

a) Aktivitas Penanganan Risiko
   Merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D.
b) *Outcome*

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.

Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) terdiri dari kelompok indeks 1 sampai dengan 5 berdasarkan hasil evaluasi SPIP terintegrasi oleh BPKP setiap tahunnya di Pemerintah Kota Semarang.

c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK menurut pasal 1 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar. yaitu:

1) Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

a) Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.
b) Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

2) Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

a) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
b) Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

3) Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

a) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan system pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;

b) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan skor 1 sampai dengan 5 yang berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahunnya di Pemerintah Kota Semarang.

2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Inspektorat. dengan indikator kinerja berikut ini:

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah direpresentasikan melalui penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Kota Semarang. Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya dijabarkan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai,

atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran. pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada beberapa komponen berikut :

1) Perencanaan Kinerja;
2) Pengukuran Kinerja;
3) Pelaporan Kinerja;
4) Evaluasi Interal; dan
5) Capaian Kinerja.

Dengan kriteria hasil penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut ini:

1) Predikat AA, dengan rentang nilai lebih dari 90 sampai dengan 100. Dapat diinterpretasikan dengan sangat memuaskan, dimana telah terwujud *Good Governance.* Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2) Predikat A, dengan rentang nilai lebih dari 80 sampai dengan 90. Dapat diinterpretasikan dengan memuaskan, dimana terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/sub koordinator.
3) Predikat BB, dengan rentang nilai lebih dari 70 sampai dengan 80. Dapat diinterpretasikan dengan sangat baik, dimana terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4) Predikat B, dengan rentang nilai lebih dari 60 sampai dengan 70. Dapat diinterpretasikan dengan baik, dimana terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

5) Predikat CC, dengan rentang nilai lebih dari 50 sampai dengan 60. Dapat diinterpretasikan dengan cukup, dimana terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar. khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6) Predikat C, dengan rentang nilai lebih dari 30 sampai dengan 50. Dapat diinterpretasikan dengan kurang, dimana Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7) Predikat D, dengan rentang dari 0 sampai dengan 30. Dapat diinterpretasikan dengan sangat kurang, dimana Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Sementara itu definisi dari Survei Kepuasan Masyarakat menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. terhadap mutu dan kualitas pelayanan pengawasan yang telah diberikan oleh Inspektorat Kota Semarang. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri Inspektorat Kota Semarang dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan Aplikasi ASIKMAS yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Kota Semarang yaitu :

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan. baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Sistem. mekanisme dan prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan. termasuk pengaduan.

3) Waktu penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/ tarif

Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk spesifikasi jenis pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

7) Perilaku pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Penanganan pengaduan. saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9) Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Penentuan responded berdasarkan target yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Semarang, pengguna layanan merupakan instansi yang menerima layanan berupa audit operasional dan audit kinerja dari Inspektorat Kota Semarang dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 54 Objek Pemeriksaan.

TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TAHUN 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah											
Sasaran 17 RPJMD - Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil											
Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Wali Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing melalui pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Meningkatnya pengendalian internal pemerintah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3.16	3.19	3.22	3.26	3.30	3.35	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance yang dikeluarkan oleh BPKP
		Meningkatnya peran pengawasan. pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* yang dikeluarkan oleh BPKP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.10	Level Manajemen Resiko Indeks (MRI) berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* yang dikeluarkan oleh BPKP
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2.90	2.95	2.96	2.97	3	3.05	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* yang dikeluarkan oleh BPKP
Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 bahwa Setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Angka	88.51	88.52	88.53	88.54	88.55	88.56	Hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.			Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat	Angka	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00	Hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat Inspektorat berdasarkan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (ASIKMAS)

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Inspektorat Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien, Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi Inspektorat Kota Semarang

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Inspektorat Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran 1 :

Meningkatnya Peran Pengawasan, Pencegahan Korupsi dan Penerapan Manajemen Risiko.

Strategi 1 : Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memberikan *Early Warning System*.

Strategi Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memberikan *Early Warning System* ditetapkan untuk memperkuat fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat korektif setelah terjadinya permasalahan, tetapi juga mampu bersifat preventif melalui pemberian peringatan dini atas potensi penyimpangan yang mungkin timbul. Sejalan dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pasal 48 sampai dengan Pasal 49 yang menyebutkan bahwa APIP berperan dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan pelaporan, serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Inspektorat

Strategi 2 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Inspektorat Kota ditetapkan sebagai langkah penguatan peran Inspektorat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Strategi ini diarahkan untuk memastikan

Inspektorat memiliki kelembagaan yang andal dan berdaya guna, sumber daya manusia yang profesional, serta sistem kerja yang terstandar dan modern. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan, Inspektorat Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan, baik dari aspek ketepatan waktu, kejelasan rekomendasi, maupun tingkat tindak lanjut hasil pengawasan.

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Inspektorat Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Tahapan Strategi Inspektorat Kota Semarang

TAHAP I (2026)	**TAHAP II (2027)**	**TAHAP III (2028)**	**TAHAP IV (2029)**	**TAHAP V (2030)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Strategi 1 : Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memberikan *Early Warning System.*	**Strategi 1 :** Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memberikan *Early Warning System.*	**Strategi 1 :** Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memberikan *Early Warning System.*	**Strategi 1 :** Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memberikan *Early Warning System.*	**Strategi 1 :** Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memberikan *Early Warning System.*
Strategi 2 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.	**Strategi 2 :** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.	**Strategi 2 :** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.	**Strategi 2 :** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.	**Strategi 2 :** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

3.2.2. Kebijakan Inspektorat Kota Semarang

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Inspektorat Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Inspektorat Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	**OPERASIONALISASI NSPK**	**ARAH KEBIJAKAN RPJMD**	**ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD**	**KET.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Wali Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing melalui pengawasan intern yang	33. Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien. transparan. dan bebas korupsi.	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
2			Peningkatan pengendalian internal dalam penerapan menajemen risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
3			Peningkatan pengendalian internal dalam pencegahan korupsi penyelenggaraan pemerintahan daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			
4	Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Pelaksanaan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Inspektorat yang berkualitas.	
5	Nomor 88 Tahun 2021 bahwa Setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun		Peningkatan kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat.	

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan merumuskan arah kebijakan. Arah kebijakan Inspektorat Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan 1 : Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan ini ditetapkan dengan maksud untuk memperkuat peran Inspektorat Kota Semarang dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Peningkatan pengawasan diarahkan tidak hanya pada fungsi pengawasan yang bersifat korektif, tetapi juga pada fungsi pencegahan melalui identifikasi potensi penyimpangan, analisis risiko, serta pemberian rekomendasi dan peringatan dini (*early warning system*) kepada perangkat daerah. Arah kebijakan ini akan dicapai melalui pelaksanaan program berikut :

Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan Pembangunan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan :
   a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
   b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
   c) Reviu Laporan Kinerja
   d) Reviu Laporan Keuangan
   e) Kerjasama Pengawasan Internal
   f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
   a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
   b) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

b. Arah Kebijakan 2 : Peningkatan pengendalian internal dalam penerapan menajemen risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan peningkatan pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan dengan maksud untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berbasis pada manajemen risiko dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui penguatan pengendalian internal, Inspektorat memberikan pendampingan, penilaian, dan rekomendasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah, Arah kebijakan ini akan dicapai melalui pelaksanaan program berikut :

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan pembangunan sebagai berikut :
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. dengan sub kegiatan :

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

c. Arah Kebijakan 3 : Peningkatan pengendalian internal dalam pencegahan korupsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan peningkatan pengendalian internal dalam pencegahan korupsi penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan dengan maksud untuk memperkuat fungsi pencegahan korupsi melalui pengendalian internal yang sistematis dan berkelanjutan. Inspektorat berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, memperkuat integritas aparatur, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. kolusi, dan nepotisme (KKN). Kedua arah kebijakan ini akan dicapai melalui pelaksanaan program berikut :

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan pembangunan sebagai berikut :
Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3) Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

d. Arah Kebijakan 4 : Pelaksanaan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Inspektorat yang berkualitas.

Arah kebijakan ini ditetapkan dengan maksud untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Kota dilaksanakan secara berkualitas, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan yang berkualitas diperlukan agar program dan kegiatan Inspektorat selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan ini akan dicapai melalui pelaksanaan program berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. dengan kegiatan Pembangunan sebagai berikut:

1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
   a). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   g). Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   e). Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

e. Arah Kebijakan 5 : Peningkatan kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat.

Arah kebijakan ini ditetapkan dengan maksud untuk memperkuat kinerja pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kota, sehingga tercipta tata kelola internal yang efektif, efisien, dan profesional. Peningkatan pelayanan umum dimaksudkan agar seluruh kegiatan administrasi, tata usaha, sarana prasarana, serta layanan penunjang lainnya dapat berjalan secara tertib, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Arah kebijakan ini akan dicapai melalui pelaksanaan program berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. dengan kegiatan Pembangunan sebagai berikut:

1). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. dengan sub kegiatan
a). Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
b). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
c). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2). Administrasi Umum Perangkat Daerah
a). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
e). Fasilitasi Kunjungan Tamu
f). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g). Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c). Pengadaan Mebel
d). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c). Pemeliharaan Mebel
d). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Inspektorat Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun *cascading* kinerja untuk menentukan program. kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 17 RPJMD: Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Meningkatnya pengendalian internal pemerintah				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Inspektur
		Meningkatnya peran pengawasan. pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Inspektur
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah			**Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I**		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I**	**06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Irban I
				Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I**	**6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	JF Irban I
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	JF Irban I
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	JF Irban I
				Terselenggaranya reviu laporan kinerja	**Persentase Terselenggaranya reviu laporan kinerja**		JF irban I
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	JF irban I

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	**Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I**	**6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	JF Irban I
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	JF Irban I
			Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II**	**06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Irban II
				Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II**	**6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	JF Irban II
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	JF Irban II
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	JF Irban II
				Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di	**Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II**	**6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II			
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	JF Irban II
			Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IIII		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III**	**06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Irban III
				Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III**	**6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	JF Irban III
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	JF Irban III
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	JF Irban III
				Terselenggaranya reviu laporan keuangan	**Persentase Terselenggaranya reviu laporan keuangan**		JF Irban III
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	JF irban III
				Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	**Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III**	**6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	JF Irban III

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Irban III
			Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV**	**06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Irban IV
				Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV**	**6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	JF Irban IV
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	JF Irban IV
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	JF Irban IV
				Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	**Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV**	**6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	JF Irban IV
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	JF Irban IV
			Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah**	**06.01.02**	Irban V

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu V		**kerja Inspektur Pembantu V**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	
				Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V**	**6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	JF Irban V
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	JF Irban V
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	JF Irban V
				Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	**Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V**	**6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	JF Irban V
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	JF Irban V
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	JF Irban V
			Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh BPK dan APIP lainnya yang ditindaklanjuti dan persentase kerjasama pengawasan**	**06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Sekretaris

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya kerjasama pengawasan	**Persentase Terselenggaranya kerjasama pengawasan**	**6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Kasubbag Perencanaan
				Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6.01.02.2.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal	JF/JP Subbag Perencanaan
				Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan	**Persentase Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan**		Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lainnya	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak LAnjut Pemeriksaan RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lainnya	JF/JP Subbag Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Wali Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian					Manajemen Resiko Indeks (MRI)		Inspektur
			Meningkatkan kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko		**Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT**	**06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Sekretaris
				Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan	**Persentase dokumen perencanaan pengawasan yang disusun**	**6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Kasubbag Perencanaan
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	JF/JP Subbag Perencanaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Intern di lingkungan masing-masing melalui pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			**Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I**		**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I**	**06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Irban I
				Tersusunnya dokumen kebijakan teknis pengawasan	**Persentase dokumen kebijakan teknis yang disusun**	**6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	JF Irban I
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	JF Irban I
					Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		Inspektur
			Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu II		**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II**	**06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Irban II
				Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	**Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi**	**6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi**	JF Irban II

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	JF Irban II
			Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu III		**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III**	**06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Irban III
				Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi	**Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi**	**6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi**	JF Irban III
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	JF Irban III
			Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV		**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV**	**06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Irban IV
				Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam	**Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan**	**6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi**	JF Irban IV

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				penyelenggaraan pemerintahan daerah	**asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah**		
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	JF Irban IV
			Meningkatkan kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko		**Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT**	**06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Sekretaris
				Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penegakan integritas	**Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penegakan integritas**	**6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi**	Kasubbagian Perencanaan
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	JF/JP Subbag Perencanaan
Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 bahwa Setiap pimpinan		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Inspektorat			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat		Inspektur
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat		**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat yang berkualitas**	**06.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Sekretaris
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat	**Persentase perencanaan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan**	**6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kasubbag Perencanaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun				**yang sesuai peraturan perundangan**			
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JF/JP Subbag Perencanaan
				Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Inspektorat	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JF/JP Subbag Perencanaan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Inspektorat	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JF/JP Subbag Perencanaan
				Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	JF/JP Subbag Perencanaan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	JF/JP Subbag Perencanaan
				Tersedianya pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan**	**6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JF/JP Subbag Evaluasi dan Pelaporan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	6.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	JF/JP Subbag Evaluasi dan Pelaporan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan**	**6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat	6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.01.01.2.02.0008	JF/JP Subbag Umum,

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kepegawaian dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan**	**6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	JF/JP Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan					Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat		Inspektur
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Inspektorat	**Nilai layanan kepegawaian Inspektorat**	**6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kasubbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	6.01.01.2.05.0011	JF/JP Subbag Umum.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.				Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepegawaian. dan Keuangan
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Inspektorat**	**6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kasubbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Inspektorat	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada Inspektorat	6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Semarang	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Semarang**	**6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kasubbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Inspektorat	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti**	**6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kasubbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Terpenuhinya Pemeliharaan aset pada Inspektorat Kota Semarang	**Persentase pemeliharaan aset SKPD**	**6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kasubbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JF/JP Subbag Umum. Kepegawaian. dan Keuangan

Sumber: Inspektorat Kota Semarang. 2025

Inspektorat Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Peningkatan Pengelolaan Risiko di Perangkat Daerah. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	6.01.02.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			➢ 6.01.02.2.01.0003 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	
2.	Peningkatan Pengelolaan Risiko di Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko 2. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	6.01.03.2.01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			➢ 6.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			➢ 6.01.03.2.01.0002 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	

Sumber: Inspektorat Kota Semarang. 2025

Inspektorat mendukung program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yaitu :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan outcome Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan melaksanakan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada setiap perangkat daerah melalui system e-Sakip juga melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKjIP) masing-masing perangkat daerah.
2. Peningkatan Pengelolaan Risiko di Perangkat Daerah dengan Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko dan Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I melalui penyusunan program kerja pengawasan berbasis risiko dan pemdampingan penyusunan resiko operasional organisasi perangkat daerah (ROO) beserta rencana tindak pengendalian (RTP) nya, serta memantau monitoring yang telah direncanakan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Semarang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PENGAWASAN				**30.109.282.184**		**33.453.199.431**		**34.908.627.866**		**35.175.969.389**		**35.806.572.675**	
06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**88 %**	**88.2 %**	**4.147.241.509**	**88.4 %**	**4.586.001.516**	**88.6 %**	**4.776.970.295**	**88.8 %**	**4.812.048.546**	**89%**	**4.894.790.875**	
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I**	**88%**	**88.2 %**	**948.000.000**	**88.4 %**	**1.047.000.000**	**88.6 %**	**1.060.000.000**	**88.8 %**	**1.070.500.000**	**89 %**	**1.081.500.000**	
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**912.500.000**		**1.009.000.000**		**1.019.000.000**		**1.028.500.000**		**1.038.500.000**	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I**	**100%**	**100 %**	**252.500.000**	**100 %**	**279.000.000**	**100 %**	**282.000.000**	**100 %**	**283.500.000**	**100 %**	**286.500.000**	
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				81.500.000		90.000.000		91.000.000		91.500.000		92.500.000	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	N/A	8 laporan	81.500.000	8 Laporan	90.000.000	8 Laporan	91.000.000	8 Laporan	91.500.000	8 laporan	92.500.000	Irban I
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				171.000.000		189.000.000		191.000.000		192.000.000		194.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	23 Laporan	171.000.000	23 Laporan	189.000.000	23 Laporan	191.000.000	23 Laporan	192.000.000	23 Laporan	194.000.000	Irban I
Terselenggaranya reviu laporan kinerja	**Persentase Terselenggaranya reviu laporan kinerja**	**N/A**	**100 %**	**660.000.000**	**100 %**	**730.000.000**	**100 %**	**737.000.000**	**100 %**	**745.000.000**	**100 %**	**752.000.000**	
6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja				660.000.000		730.000.000		737.000.000		745.000.000		752.000.000	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	2 Laporan	660.000.000	2 Laporan	730.000.000	2 Laporan	737.000.000	2 Laporan	745.000.000	2 Laporan	752.000.000	
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				**35.500.000**		**38.000.000**		**41.000.000**		**42.000.000**		**43.000.000**	
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	**Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I**	**100 %**	**100 %**	**35.500.000**	**100 %**	**38.000.000**	**100 %**	**41.000.000**	**100 %**	**42.000.000**	**100 %**	**43.000.000**	
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				35.500.000		38.000.000		41.000.000		42.000.000		43.000.000	
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	N/A	5 Laporan	35.500.000	5 Laporan	38.000.000	5 Laporan	41.000.000	5 Laporan	42.000.000	5 Laporan	43.000.000	Irban I

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II**	**88%**	**88.2 %**	**288.000.000**	**88.4 %**	**317.000.000**	**88.6 %**	**323.000.000**	**88.8 %**	**325.500.000**	**89 %**	**329.500.000**	
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**252.500.000**		**279.000.000**		**282.000.000**		**283.500.000**		**286.500.000**	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II**	**100 %**	**100 %**	**252.500.000**	**100 %**	**279.000.000**	**100 %**	**282.000.000**	**100 %**	**283.500.000**	**100 %**	**286.500.000**	
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				81.500.000		90.000.000		91.000.000		91.500.000		92.500.000	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	N/A	8 laporan	81.500.000	8 Laporan	90.000.000	8 Laporan	91.000.000	8 Laporan	91.500.000	8 laporan	92.500.000	Irban II
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				171.000.000		189.000.000		191.000.000		192.000.000		194.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	23 Laporan	171.000.000	23 Laporan	189.000.000	23 Laporan	191.000.000	23 Laporan	192.000.000	23 Laporan	194.000.000	Irban II
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				**35.500.000**		**38.000.000**		**41.000.000**		**42.000.000**		**43.000.000**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	**Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II**	**100 %**	**100 %**	**35.500.000**	**100 %**	**38.000.000**	**100 %**	**41.000.000**	**100 %**	**42.000.000**	**100 %**	**43.000.000**	
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				35.500.000		38.000.000		41.000.000		42.000.000		43.000.000	
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	N/A	5 Laporan	35.500.000	5 Laporan	38.000.000	5 Laporan	41.000.000	5 Laporan	42.000.000	5 Laporan	43.000.000	Irban II
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III**	**88 %**	**88.2 %**	**443.000.000**	**88.4 %**	**489.000.000**	**88.6 %**	**503.000.000**	**88.8 %**	**507.500.000**	**89 %**	**521.500.000**	
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**407.500.000**		**451.000.000**		**462.000.000**		**465.500.000**		**478.500.000**	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III**	**100 %**	**100 %**	**252.500.000**	**100 %**	**279.000.000**	**100 %**	**282.000.000**	**100 %**	**283.500.000**	**100 %**	**286.500.000**	
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				81.500.000		90.000.000		91.000.000		91.500.000		92.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	N/A	8 laporan	81.500.000	8 Laporan	90.000.000	8 Laporan	91.000.000	8 Laporan	91.500.000	8 laporan	92.500.000	Irban III
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				171.000.000		189.000.000		191.000.000		192.000.000		194.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	23 Laporan	171.000.000	23 Laporan	189.000.000	23 Laporan	191.000.000	23 Laporan	192.000.000	23 Laporan	194.000.000	Irban III
Terselenggaranya reviu laporan keuangan	**Persentase Terselenggaranya reviu laporan keuangan**	**100 %**	**100 %**	**155.000.000**	**100 %**	**172.000.000**	**100 %**	**180.000.000**	**100 %**	**182.000.000**	**100 %**	**192.000.000**	
6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan				155.000.000		172.000.000		180.000.000		182.000.000		192.000.000	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	155.000.000	1 Laporan	172.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	182.000.000	1 Laporan	192.000.000	
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				**35.500.000**		**38.000.000**		**41.000.000**		**42.000.000**		**43.000.000**	
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	**Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III**	**100 %**	**100 %**	**35.500.000**	**100 %**	**38.000.000**	**100 %**	**41.000.000**	**100 %**	**42.000.000**	**100 %**	**43.000.000**	
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				35.500.000		38.000.000		41.000.000		42.000.000		43.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	N/A	5 Laporan	35.500.000	5 Laporan	38.000.000	5 Laporan	41.000.000	5 Laporan	42.000.000	5 Laporan	43.000.000	Irban III
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV**	**88%**	**88.2 %**	**288.000.000**	**88.4 %**	**317.000.000**	**88.6 %**	**323.000.000**	**88.8 %**	**325.500.000**	**89 %**	**329.500.000**	
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**252.500.000**		**279.000.000**		**282.000.000**		**283.500.000**		**286.500.000**	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV**	**100 %**	**100 %**	**252.500.000**	**100 %**	**279.000.000**	**100 %**	**282.000.000**	**100 %**	**283.500.000**	**100 %**	**286.500.000**	
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				81.500.000		90.000.000		91.000.000		91.500.000		92.500.000	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	N/A	8 laporan	81.500.000	8 Laporan	90.000.000	8 Laporan	91.000.000	8 Laporan	91.500.000	8 laporan	92.500.000	Irban IV
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				171.000.000		189.000.000		191.000.000		192.000.000		194.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	23 Laporan	171.000.000	23 Laporan	189.000.000	23 Laporan	191.000.000	23 Laporan	192.000.000	23 Laporan	194.000.000	Irban IV
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				**35.500.000**		**38.000.000**		**41.000.000**		**42.000.000**		**43.000.000**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	**Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV**	**100 %**	**100 %**	**35.500.000**	**100 %**	**38.000.000**	**100 %**	**41.000.000**	**100 %**	**42.000.000**	**100 %**	**43.000.000**	
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				35.500.000		38.000.000		41.000.000		42.000.000		43.000.000	
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	N/A	5 Laporan	35.500.000	5 Laporan	38.000.000	5 Laporan	41.000.000	5 Laporan	42.000.000	5 Laporan	43.000.000	Irban IV
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V**	**88 %**	**88.2 %**	**737.241.509**	**88.4 %**	**801.001.516**	**88.6 %**	**845.970.295**	**88.8 %**	**853.048.546**	**89 %**	**865.790.875**	
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**101.000.000**		**112.000.000**		**113.000.000**		**118.000.000**		**119.000.000**	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah V	**Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V**	**100 %**	**100 %**	**101.000.000**	**100 %**	**112.000.000**	**100 %**	**113.000.000**	**100 %**	**118.000.000**	**100 %**	**119.000.000**	
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				41.000.000		46.000.000		46.000.000		47.000.000		48.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	N/A	4 Laporan	41.000.000	4 Laporan	46.000.000	4 Laporan	46.000.000	4 Laporan	47.000.000	4 Laporan	48.000.000	Irban V
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60.000.000		66.000.000		67.000.000		71.000.000		71.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	8 Laporan	60.000.000	8 Laporan	66.000.000	8 Laporan	67.000.000	8 Laporan	71.000.000	8 Laporan	71.000.000	Irban V
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				**636.241.509**		**689.001.516**		**732.970.295**		**735.048.546**		**746.790.875**	
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	**Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V**	**100 %**	**100 %**	**636.241.509**	**100 %**	**689.001.516**	**100 %**	**732.970.295**	**100 %**	**735.048.546**	**100 %**	**746.790.875**	
6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				68.000.000		73.500.000		78.500.000		79.000.000		80.000.000	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0	1 Laporan	68.000.000	1 Laporan	73.500.000	1 Laporan	78.500.000	1 Laporan	79.000.000	1 Laporan	80.000.000	Irban V
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				568.241.509		615.501.516		654.470.295		656.048.546		666.790.875	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	N/A	80 Laporan	568.241.509	80 Laporan	615.501.516	80 Laporan	654.470.295	80 Laporan	656.048.546	80 Laporan	666.790.875	Irban V
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh BPK dan APIP lainnya yang ditindaklanjuti**	**88 %**	**88.2 %**	**1.443.000.000**	**88.4 %**	**1.615.000.000**	**88.6 %**	**1.722.000.000**	**88.8 %**	**1.730.000.000**	**89 %**	**1.767.000.000**	
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**1.443.000.000**		**1.615.000.000**		**1.722.000.000**		**1.730.000.000**		**1.767.000.000**	
Terselenggaranya kerjasama pengawasan	**Persentase Terselenggaranya kerjasama pengawasan**	**100%**	**100%**	**1.076.000.000**	**100%**	**1.189.000.000**	**100%**	**1.201.000.000**	**100%**	**1.205.000.000**	**100%**	**1.217.000.000**	
6.01.02.2.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal				1.076.000.000		1.189.000.000		1.201.000.000		1.205.000.000		1.217.000.000	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	15	2 Kesepakatan	1.076.000.000	2 Kesepakatan	1.189.000.000	2 Kesepakatan	1.201.000.000	2 Kesepakatan	1.205.000.000	2 Kesepakatan	1.217.000.000	
Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasa	**Persentase Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan**	**100 %**	**100 %**	**367.000.000**	**100 %**	**426.000.000**	**100 %**	**521.000.000**	**100 %**	**525.000.000**	**100 %**	**550.000.000**	
6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lainnya				367.000.000		426.000.000		521.000.000		525.000.000		550.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lainnya	60 Dokumen	4 Dokumen	367.000.000	4 Dokumen	426.000.000	4 Dokumen	521.000.000	4 Dokumen	525.000.000	4 Dokumen	550.000.000	
06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		**100 %**	**100 %**	**4.947.885.111**	**100 %**	**5.471.349.709**	**100 %**	**5.699.185.867**	**100 %**	**5.741.036.132**	**100 %**	**5.839.752.240**	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I**	**100 %**	**100 %**	**332.000.0000**	**100 %**	**367.000.000**	**100 %**	**382.000.000**	**100 %**	**385.000.000**	**100 %**	**389.000.000**	
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				**332.000.000**		**367.000.000**		**382.000.000**		**385.000.000**		**389.000.000**	
Tersusunnya dokumen kebijkan teknis pengawasan	**Persentase dokumen kebijakan teknis yang disusun**	**100 %**	**100 %**	**332.000.000**	**100 %**	**367.000.000**	**100 %**	**382.000.000**	**100 %**	**385.000.000**	**100 %**	**389.000.000**	
6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				332.000.000		367.000.000		382.000.000		385.000.000		389.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	332.000.000	2 Rekomendasi	367.000.000	2 Rekomendasi	382.000.000	2 Rekomendasi	385.000.000	2 Rekomendasi	389.000.000	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II**	**100 %**	**100 %**	**2.880.000.000**	**100 %**	**3.000.000.000**	**100 %**	**3.100.000.000**	**100 %**	**3.115.000.000**	**100 %**	**3.120.000.000**	
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi				**2.880.000.000**		**3.000.000.000**		**3.100.000.000**		**3.115.000.000**		**3.120.000.000**	
Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	**Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi**	**100 %**	**100 %**	**2.880.000.000**	**100 %**	**3.000.000.000**	**100 %**	**3.100.000.000**	**100 %**	**3.115.000.000**	**100 %**	**3.120.000.000**	
6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2.880.000.000		3.000.000.000		3.100.000.000		3.115.000.000		3.120.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	6 Kegiatan	10 Kegiatan	2.880.000.000	10 Kegiatan	3.000.000.000	10 Kegiatan	3.100.000.000	10 Kegiatan	3.115.000.000	10 Kegiatan	3.120.000.000	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III**	**100 %**	**100 %**	**570.000.000**	**100 %**	**630.000.000**	**100 %**	**650.000.000**	**100 %**	**655.000.000**	**100 %**	**660.000.000**	
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi				**570.000.000**		**630.000.000**		**650.000.000**		**655.000.000**		**660.000.000**	
Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi	**Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi**	**100 %**	**100 %**	**570.000.000**	**100 %**	**630.000.000**	**100 %**	**650.000.000**	**100 %**	**655.000.000**	**100 %**	**660.000.000**	
6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				570.000.000		630.000.000		650.000.000		655.000.000		660.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	570.000.000	51 Perangkat Daerah	630.000.000	51 Perangkat Daerah	650.000.000	51 Perangkat Daerah	655.000.000	51 Perangkat Daerah	660.000.000	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV**	**100 %**	**100 %**	**872.000.000**	**100 %**	**880.000.000**	**100 %**	**900.000.000**	**100 %**	**905.000.000**	**100 %**	**910.000.000**	
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi				**872.000.000**		**880.000.000**		**900.000.000**		**905.000.000**		**910.000.000**	
Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah**	**100 %**	**100 %**	**872.000.000**	**100**	**880.000.000**	**100**	**900.000.000**	**100**	**905.000.000**	**100**	**910.000.000**	
6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				872.000.000		880.000.000		900.000.000		905.000.000		910.000.000	
Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	872.000.000	51 Perangkat Daerah	880.000.000	51 Perangkat Daerah	900.000.000	51 Perangkat Daerah	905.000.000	51 Perangkat Daerah	910.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko	**Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT**	**100 %**	**100 %**	**293.885.111**	**100 %**	**594.349.709**	**100 %**	**667.185.867**	**100 %**	**681.036.132**	**100 %**	**760.752.240**	
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				**77.000.000**		**85.000.000**		**88.000.000**		**90.000.000**		**91.000.000**	
Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan	**Persentase dokumen perencanaan pengawasan yang disusun**	**100 %**	**100 %**	**77.000.000**	**100 %**	**85.000.000**	**100 %**	**88.000.000**	**100 %**	**90.000.000**	**100 %**	**91.000.000**	
6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				77.000.000		85.000.000		88.000.000		90.000.000		91.000.000	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	77.000.000	2 Rekomendasi	85.000.000	2 Rekomendasi	88.000.000	2 Rekomendasi	90.000.000	2 Rekomendasi	91.000.000	
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi				**216.885.111**		**509.349.709**		**579.185.867**		**591.036.132**		**669.752.240**	
Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penegakan integritas	**Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penegakan integritas**	**100 %**	**100 %**	**216.885.111**	**100 %**	**509.349.709**	**100 %**	**579.185.867**	**100 %**	**591.036.132**	**100 %**	**669.752.240**	
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				216.885.111		509.349.709		579.185.867		591.036.132		669.752.240	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	216.885.111	50 Perangkat Daerah	509.349.709	50 Perangkat Daerah	579.185.867	50 Perangkat Daerah	591.036.132	50 Perangkat Daerah	669.752.240	
06.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**100 %**	**100 %**	**21.014.155.564**	**100 %**	**23.395.848.206**	**100 %**	**24.432.471.704**	**100 %**	**24.622.884.711**	**100 %**	**25.072.029.560**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat yang berkualitas**	**100 %**	**100 %**	**18.180.500.000**	**100 %**	**19.139.000.000**	**100 %**	**20.091.100.000**	**100 %**	**21.085.000.000**	**100 %**	**22.042.000.000**	
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**80.500.000**		**84.000.000**		**88.500.000**		**90.000.000**		**92.000.000**	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan**	**100 %**	**100 %**	**29.500.000**	**100 %**	**32.800.000**	**100 %**	**37.100.000**	**100 %**	**38.400.000**	**100 %**	**40.000.000**	
6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21.400.000		23.300.000		27.000.000		27.500.000		28.200.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat	10 Dokumen	4 Dokumen	21.400.000	4 Dokumen	23.300.000	4 Dokumen	27.000.000	4 Dokumen	27.500.000	4 Dokumen	28.200.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.800.000		2.000.000		2.300.000		2.500.000		2.800.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.800.000	
6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.100.000		2.500.000		2.600.000		2.800.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	3.000.000	
6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.100.000		2.500.000		2.600.000		2.800.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	3.000.000	
6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.100.000		2.500.000		2.600.000		2.800.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	3.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
Tersedianya pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan**	**15**	**100%**	**51.000.000**	**100%**	**51.200.000**	**100%**	**51.400.000**	**100%**	**51.600.000**	**100%**	**52.000.000**	
6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		2.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.200.000	4 Laporan	1.400.000	4 Laporan	1.600.000	4 Laporan	2.000.000	
6.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersusunnya dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	NA	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**18.100.000.000**		**19.055.000.000**		**20.002.600.000**		**20.995.000.000**		**21.950.000.000**	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan	**Persentase administrasi dan pelaporan**	**100 %**	**100 %**	**18.100.000.000**	**100 %**	**19.055.000.000**	**100 %**	**20.002.600.000**	**100 %**	**20.995.000.000**	**100 %**	**21.950.000.000**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	**keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan**												
6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.803.754.293		18.693.942.008		19.628.639.108		20.610.071.063		21.640.574.617	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang / bulan	85 Orang / bulan	17.803.754.293	85 Orang / bulan	18.693.942.008	85 Orang / bulan	19.628.639.108	85 Orang / bulan	20.610.071.063	85 Orang / bulan	21.640.574.617	
6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				292.800.000		357.300.000		370.000.000		380.000.000			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	292.800.000	12 Dokumen	357.300.000	12 Dokumen	370.000.000	12 Dokumen	380.000.000	12 Dokumen	304.700.000	
6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000		1.600.000		1.700.000		2.000.000		1.900.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.600.000	1 Laporan	1.700.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.900.000	
6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.500.000		1.600.000		1.700.000		2.000.000		1.900.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	N/a	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.600.000	2 Laporan	1.700.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	1.900.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				445.707		557.992		560.892		928.937		925.383	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1 Dokumen	445.707	1 Dokumen	557.992	1 Dokumen	560.892	1 Dokumen	928.937	1 Dokumen	925.383	
6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**2.400.000**		**2.400.000**		**2.400.000**		**2.400.000**		**2.400.000**	
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan**	**N/A**	**100 %**	**2.400.000**	**100 %**	**2.400.000**	**100 %**	**2.400.000**	**100 %**	**2.400.000**	**100 %**	**2.400.000**	
6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	4 Laporan	2.400.000	4 Laporan	2.400.000	4 Laporan	2.400.000	4 Laporan	2.400.000	4 Laporan	2.400.000	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas	**Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat**	**100 %**	**100 %**	**2.833.655.564**	**100 %**	**4.256.848.206**	**100 %**	**4.341.371.704**	**100 %**	**3.537.884.711**	**100 %**	**3.030.029.560**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dalam mendukung kinerja Inspektorat													
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**998.655.500**		**1.735.000.000**		**1.686.100.000**		**1.758.200.000**		**1.268.700.000**	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Inspektorat	**Nilai layanan kepegawaian Inspektorat**	**N/A**	**90,50 %**	**998.655.500**	**90,75 %**	**1.735.000.000**	**91 %**	**1.686.100.000**	**91,25 %**	**1.758.200.000**	**91,50 %**	**1.268.700.000**	
6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/a	1 Dokumen	2.400.000	1 Dokumen	2.400.000	1 Dokumen	2.400.000	1 Dokumen	2.400.000	1 Dokumen	2.400.000	
6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				800.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		990.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	80 Orang	800.000.000	80 Orang	1.300.000.000	80 Orang	1.300.000.000	80 Orang	1.300.000.000	80 Orang	990.000.000	
6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				196.255.500		432.600.000		383.700.000		455.800.000		276.300.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	300 Orang	360 Orang	196.255.500	360 Orang	432.600.000	360 Orang	383.700.000	360 Orang	455.800.000	360 Orang	276.300.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peraturan Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				**635.000.000**		**651.000.000**		**674.000.000**		**678.300.000**		**660.000.000**	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Inspektorat**	**100 %**	**100 %**	**635.000.000**	**100 %**	**651.000.000**	**100 %**	**674.000.000**	**100 %**	**678.300.000**	**100 %**	**660.000.000**	
6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	90.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	90.000.000	
6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		85.000.000		86.000.000		87.000.000		88.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	1 Paket	80.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	86.000.000	1 Paket	87.000.000	1 Paket	88.000.000	
6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				44.000.000		45.000.000		46.000.000		47.000.000		48.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	1 Paket	44.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	46.000.000	1 Paket	47.000.000	1 Paket	48.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	
6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		310.000.000		331.000.000		333.300.000		313.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300 Laporan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	310.000.000	12 Laporan	331.000.000	12 Laporan	333.300.000	12 Laporan	313.000.000	
6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000	
Terlaksananya dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada Inspektorat	30 Dokumen	12 Dokumen	28.000.000	12 Dokumen	28.000.000	12 Dokumen	28.000.000	12 Dokumen	28.000.000	12 Dokumen	28.000.000	
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**445.700.000**		**1.116.500.000**		**1.226.900.000**		**347.000.000**		**347.000.000**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat**	**100 %**	**100 %**	**445.700.000**	**100 %**	**1.116.500.000**	**100 %**	**1.226.900.000**	**100 %**	**347.000.000**	**100 %**	**347.000.000**	
6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		970.000.000		1.079.900.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	3 Unit	300.000.000	5 Unit	970.000.000	5 Unit	1.079.900.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	
6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel				15.700.000		16.000.000		16.250.000		16.500.000		16.500.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/a	10 Unit	15.700.000	10 Unit	16.000.000	10 Unit	16.250.000	10 Unit	16.500.000	10 Unit	16.500.000	
6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya				105.000.000		105.000.000		105.250.000		105.000.000		105.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/a	10 Unit	105.000.000	10 Unit	105.000.000	10 Unit	105.250.000	10 Unit	105.000.000	10 Unit	105.000.000	
6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	10 Unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.500.000	1 Unit	25.500.000	1 Unit	25.500.000	1 Unit	25.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bangunan Lainnya yang Disediakan												
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**270.500.000**		**270.500.000**		**270.500.000**		**270.500.000**		**270.500.000**	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Inspektorat	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**270.500.000**	**100 %**	**270.500.000**	**100 %**	**270.500.000**	**100 %**	**270.500.000**	**100 %**	**270.500.000**	
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				263.500.000		263.500.000		263.500.000		263.500.000		263.500.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	N/a	12 Laporan	263.500.000	12 Laporan	263.500.000	12 Laporan	263.500.000	12 Laporan	263.500.000	12 Laporan	263.500.000	
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**481.400.064**		**481.448.206**		**481.471.704**		**481.484.711**		**481.429.560**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpenuhinya Pemeliharaan aset pada Inspektorat Kota Semarang	**Persentase pemeliharaan aset SKPD**	**100 %**	**100 %**	**481.400.064**	**100 %**	**481.448.206**	**100 %**	**481.471.704**	**100 %**	**481.484.711**	**100 %**	**481.429.560**	
6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.400.000		32.400.000		32.400.000		32.400.000		32.400.000	
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	32.400.000	1 Unit	32.400.000	1 Unit	32.400.000	1 Unit	32.400.000	1 Unit	32.400.000	
6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	280.000.000	36 Unit	280.000.000	40 Unit	280.000.000	40 Unit	280.000.000	40 Unit	280.000.000	
6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel				9.000.064		9.048.206		9.071.704		9.084.711		9.029.560	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	150 Unit	9.000.064	150 Unit	9.048.206	150 Unit	9.071.704	150 Unit	9.084.711	150 Unit	9.029.560	
6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	80.000.000	125 Unit	80.000.000	125 Unit	80.000.000	125 Unit	80.000.000	125 Unit	80.000.000	
6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	80.000.000	45 Unit	80.000.000	45 Unit	80.000.000	45 Unit	80.000.000	45 Unit	80.000.000	

Sumber: Inspektorat Kota Semarang. 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Inspektorat Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya pengendalian internal pemerintah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3.16	3.19	3.22	3.26	3.3	3.35	
2.		Meningkatnya peran pengawasan, pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	
3.			Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.10	
4.			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2.90	2.95	2.96	2.97	3	3.05	

Sumber: Inspektorat Kota Semarang. 2025

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3.16	3.19	3.22	3.26	3.3	3.35	
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	
3.	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Angka	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.10	

Sumber: Inspektorat Kota Semarang. 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Inspektorat Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan di bidang pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Inspektorat Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Semarang.

Permasalahan pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Inspektorat Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait. termasuk perguruan tinggi. masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Inspektorat Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Inspektorat Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan pengawasan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

36. KECAMATAN SEMARANG SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang maka Kecamatan Semarang Selatan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pemberdayaan masyarakat, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R4epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
27. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Semarang Selatan adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Selatan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Kecamatan Semarang Selatan

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Semarang Selatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Semarang Selatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SEMARANG SELATAN

II.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

II.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Semarang Selatan bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; dimana disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Semarang Selatan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
9. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
11. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;

12. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
13. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
14. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

A. Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Selatan

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Selatan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Camat
   Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Sekretariat

   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

   Sekretariat terdiri atas :

   1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
   2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Kepala Sub Bagian, terdiri dari
   a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
   b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Kepala Seksi Kecamatan, terdiri dari:
   a. Kasi Pemerintahan
      Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

   b. Kasi Pembangunan
      Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

c. Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

d. Kasi Pelayanan Publik
Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.

f. Jabatan Fungsional
Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk Bagan struktur kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Lurah
Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Sekretariat Kelurahan
Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

3. Kepala Seksi Kelurahan, terdiri dari:
    a. Kasi Pembangunan Kelurahan
    Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.

    b. Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
    Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.

    c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
    Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

Sedangkan Bagan Struktur Kecamatan berdasarkan Perda No. 47 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

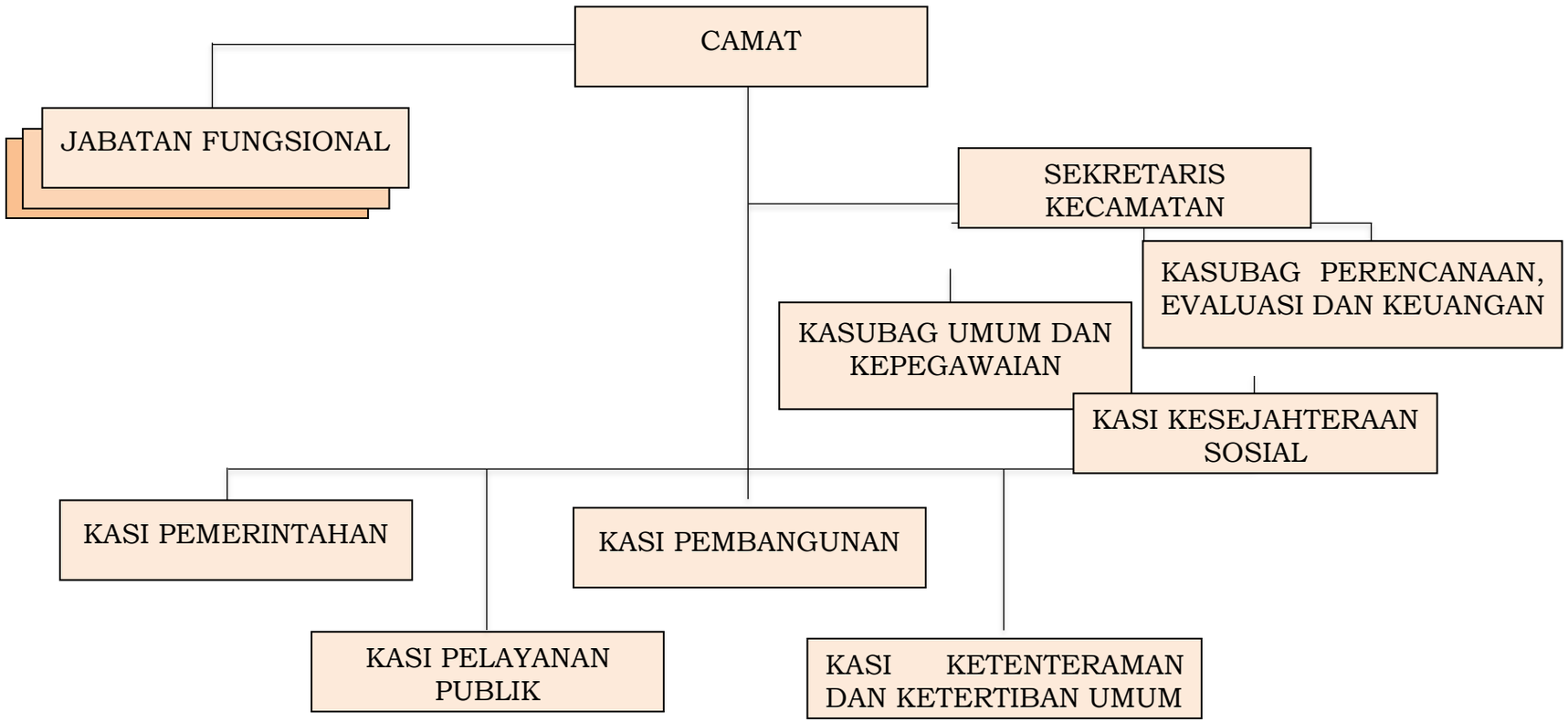

Sedangkan Bagan Struktur Kelurahan berdasarkan Perda No. 47 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gamber 2.2

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

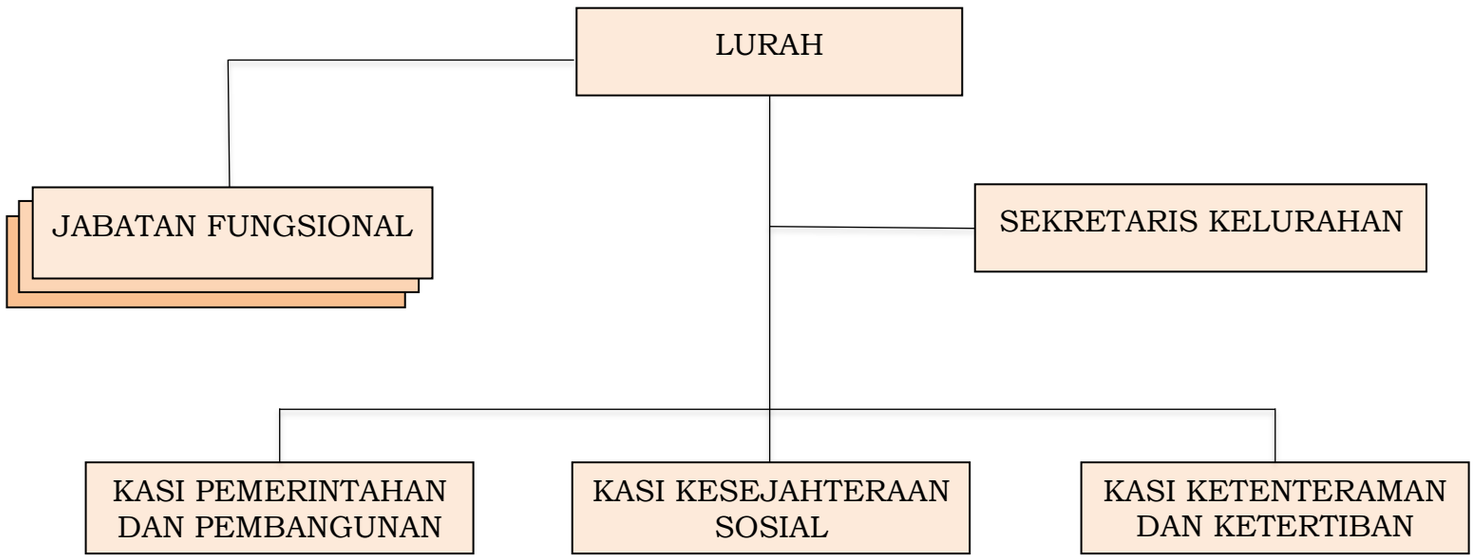

B. Uraian Tugas Dan Jabatan Struktural Kecamatan

Adapun untuk Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Semarang Selatan yaitu sebagai berikut :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

1) perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5) penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6) penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11) penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
15) penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16) penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;

17) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
18) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
19) penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Semarang Selatan menyelenggarakan fungsi :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   d) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   e) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
   g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
   h) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
   b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
   d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
   a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
   b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
   a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   b) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   c) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   d) evaluasi Kelurahan.
9) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
   e) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
   f) Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   g) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   h) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   i) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;

j) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
k) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
l) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
m) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
n) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
o) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
p) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
b) penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
c) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
d) pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan.

11) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
a) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
b) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
c) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
d) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
e) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

13) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
b) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
c) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

14) Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
7) pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
8) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
9) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
10) pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
11) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
12) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
13) pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
14) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
15) pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
16) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
17) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
18) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
19) pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
20) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan

pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
21) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
22) pelaksanaan administrasi umum Kecamatan; pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
23) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
24) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
25) pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
26) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
27) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
28) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
29) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
6) menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
7) menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
10) menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
11) menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
13) menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
17) menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
20) menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
22) menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
24) menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
25) menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
26) menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
27) menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
28) menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
29) menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
30) menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
32) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

33) menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
34) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
35) menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;
36) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
37) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan; mm.menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
39) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
40) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
41) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
6) menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
9) menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
10) menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
11) menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16) menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
17) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

18) menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);
20) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
21) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
22) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
24) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
25) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
28) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
29) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
30) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
32) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
33) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
8) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;

9) menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
11) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
13) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
14) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia; r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
20) menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
21) menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
22) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
23) menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
24) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
25) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
26) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
27) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
28) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
29) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;

30) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
31) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
32) menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
34) menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
35) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
36) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
37) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; mm.menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
39) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
40) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
41) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
42) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
6) menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
7) menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
8) menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;

11) menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
12) menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
14) menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
15) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
16) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
17) menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
18) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
19) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
20) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
21) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
22) menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
24) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
26) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
27) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;

8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
11) menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
20) menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum; u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
21) menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
25) menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
28) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang,

bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;

29) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
30) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
32) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
34) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
35) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
37) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
38) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
39) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
40) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2) pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
9) pelaksanaan kegiatan koordinasi;
10) pelaksanaan kegiatan sekretariat;
11) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
12) pelaksanaan kegiatan pembangunan;
13) pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
14) pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
15) pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
16) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
17) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;

18) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
19) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
20) pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
21) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
   3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   4) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   5) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
   2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
   3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
   4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
   1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
   3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   2) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   3) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   4) evaluasi Kelurahan;
i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
   1) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   2) peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   3) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   4) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   5) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;

6) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
7) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
8) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
9) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
10) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
2) penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
3) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
4) Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
2) peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3) penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
4) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
5) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;
n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan
o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

II.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

A. Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Selatan

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada Juni 2025, jumlah ASN terdiri dari PNS dan PPPK sebanyak 75 pegawai, dengan jumlah 35 pegawai laki-laki dan 40 pegawai perempuan. Selain itu, terdapat pegawai yang bukan merupakan ASN (Pegawai Non ASN) sebanyak 21 pegawai, yang terdiri dari 17 pegawai laki-laki dan 4 pegawai perempuan.

Sumberdaya manusia pada Kecamatan Semarang Selatan berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Semarang Selatan Juni 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD Sederajat	-	-	-	3	-	3	3
2	SMP Sederajat	1	-	1	-	-	-	1
3	SMA Sederajat	1	2	3	12	2	14	17
4	D3	6	5	11	-	-	-	11
5	D4/S1	22	27	49	2	2	4	53
6	S2	5	6	11	-	-	-	11
7	S3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	35	40	75	17	4	21	96

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan per Juni 2025

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN Kelurahan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 berdasarkan jenjang Pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2
Jumlah pegawai per unit pada Kecamatan Semarang Selatan Juni 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kecamatan/Kelurahan	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JUMLAH
1	Kecamatan	4	14	6	7	1	3	35
2	Bulustalan	1	4	-	2	-	-	7
3	Barusari	2	3	-	-	-	-	5
4	Randusari	-	5	-	-	-	-	5
5	Mugassari	-	3	1	2	-	-	6
6	Pleburan	-	5	1	-	-	-	6
7	Wonodri	1	3	1	1	-	-	6
8	Peterongan	-	6	-	2	-	-	8
9	Lamper Kidul	1	2	1	1	-	-	5
10	Lamper Lor	-	4	1	1	-	-	6
11	Lamper Tengah	2	4	-	1	-	-	7
	Jumlah	**11**	**53**	**11**	**17**	**1**	**3**	**96**

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan per Juni 2025

Gambar 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

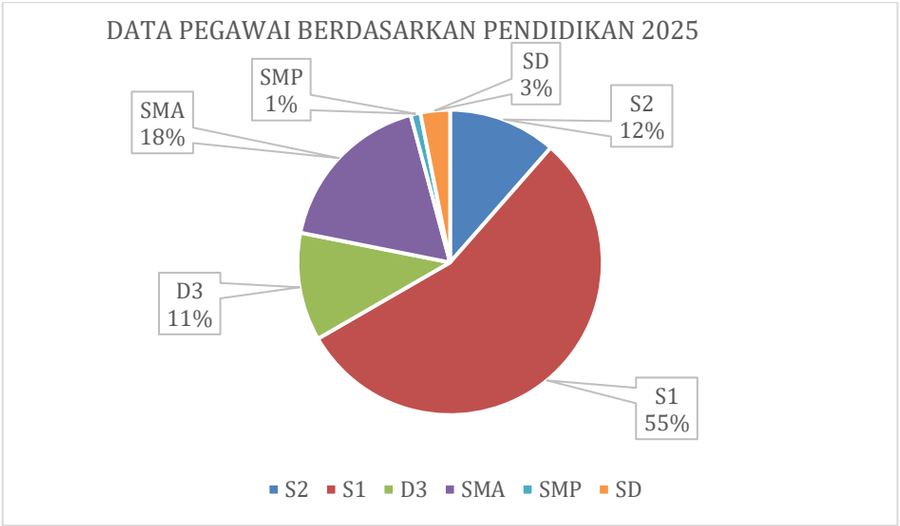

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari pegawai yang termasuk golongan IV sebanyak 4 pegawai, golongan III sebanyak 51 pegawai, golongan II sebanyak 5 pegawai, golongan I sebanyak 1 pegawai, golongan IX sebanyak 12 pegawai, golongan VII sebanyak 1 pegawai, dan golongan VI sebanyak 1 pegawai, secara detail dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan di Kecamatan Semarang Selatan Juni 2025

No	Golongan / Ruang	Pegawai			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Jumlah	
1.	Golongan IV			4	5,3
	IV/b	1	-	1	1,3
	IV/a	2	1	3	4
2.	Golongan III			51	67,8
	III/d	11	15	26	34.6
	III/c	9	10	19	25,3
	III/b	2	3	5	6,6
	III/a	-	1	1	1,3
3.	Golongan II			5	6,6
	II/d	1	-	1	1,3
	II/c	2	2	4	5,3
4.	Golongan I			1	1,3
	I/d	1	-	1	1,3
5.	Golongan IX			12	16
	IX	4	8	12	16
6.	Golongan VII			1	1,3
	VII	1	-	1	1,3
7.	Golongan VI			1	1,3

No	Golongan / Ruang	Pegawai			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Jumlah	
		1	-	1	1,3
JUMLAH		35	40	75	100

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan per Juni 2025

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN Kelurahan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang per Juni 2025 berdasarkan Golongan/Ruang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.4
Jumlah ASN per unit Kecamatan Semarang Selatan per Juni 2025
Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Kecamatan/Kelurahan	IV	III	II	I	VI	VII	IX	JUMLAH
1	Kecamatan	3	6	4	1	1	1	6	22
2	Bulustalan	1	4	-	-	-	-	-	5
3	Barusari	-	4	-	-	-	-	1	5
4	Randusari	-	4	-	-	-	-	1	5
5	Mugassari	-	5	-	-	-	-	-	5
6	Pleburan	-	4	1	-	-	-	1	6
7	Wonodri	-	5	-	-	-	-	-	5
8	Peterongan	-	6	-	-	-	-	1	7
9	Lamper Kidul	-	4	-	-	-	-	-	4
10	Lamper Lor	-	4	-	-	-	-	1	5
11	Lamper Tengah	-	5	-	-	-	-	1	6
	Jumlah	4	51	5	1	1	1	12	75

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan per Juni 2025

Gambar 2.4
Komposisi ASN Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

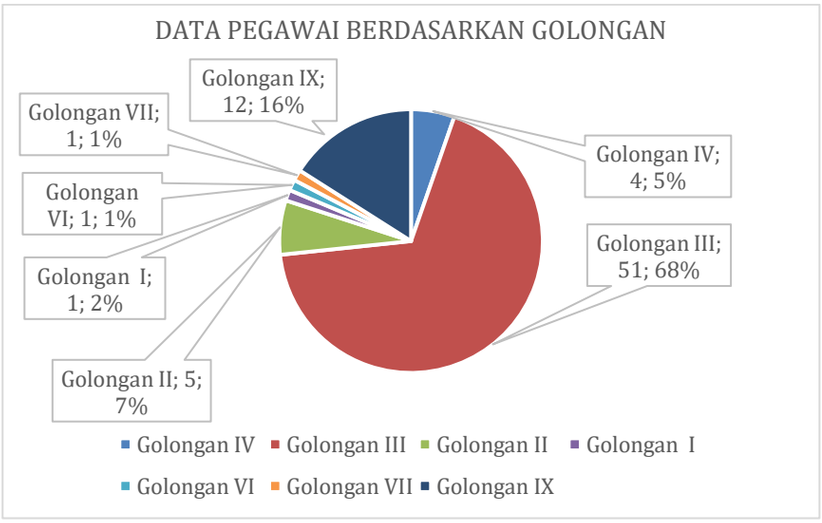

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 75 ASN terdapat 2 pegawai yang menduduki eselon III, 52 pegawai yang menduduki eselon IV, 3 pegawai yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, dan 18 pegawai yang termasuk dalam jabatan pelaksana, dimana secara detail dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5
Jumlah ASN Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Pelaksana di Kecamatan Semarang Selatan Juni 2025

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1.	Eselon III	2	2.66
2.	Eselon IV	52	69.33
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	3	4
4.	Jabatan Pelaksana	18	24
JUMLAH		75	100

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan per Juni 2025

Gambar 2.5
Komposisi ASN Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Pelaksana

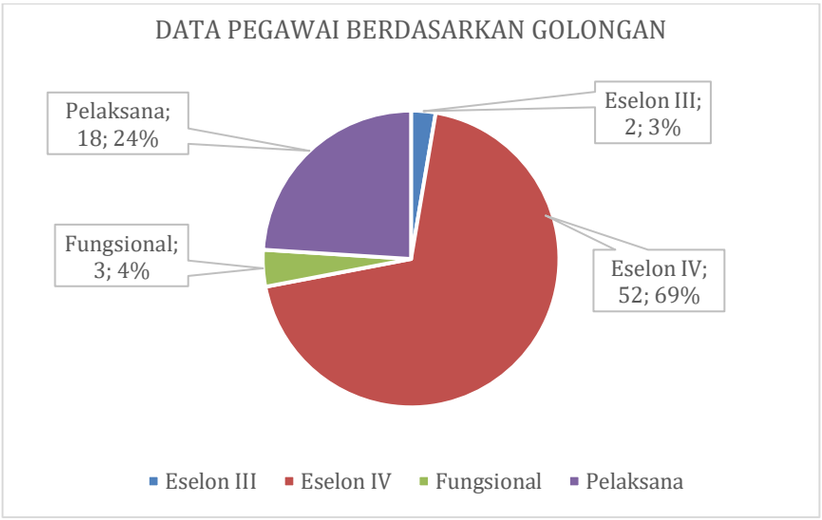

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN Kelurahan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang per Juni 2025 berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Pelaksana, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.6
Jumlah ASN kelurahan pada Kecamatan Semarang Selatan
Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan
Pelaksana Juni 2025

No	Kecamatan/Kelurahan	III	IV	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	JUMLAH
1	Kecamatan	2	7	3	10	22
2	Bulustalan	-	5	-	-	5
3	Barusari	-	4	-	1	5
4	Randusari	-	4	-	1	5
5	Mugassari	-	5	-	-	5
6	Pleburan	-	4	-	2	6
7	Wonodri	-	5	-	-	5
8	Peterongan	-	5	-	2	7
9	Lamper Kidul	-	4	-	-	4
10	Lamper Lor	-	4	-	1	5
11	Bulustalan	-	5	-	1	6
	Jumlah	2	52	3	18	75

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan per Juni 2025

B. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Semarang Selatan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang Tahun 2024

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Meja Eselon III	9 unit
2	Kursi Eselon III	8 unit
3	Sepeda Motor	4 unit
4	Kursi Rapat	165 unit
5	Printer	19 unit
7	Komputer	25 unit
8	Sound System	4 unit
9	Meja Komputer	16 unit
10	Proyektor + Layar	3 unit
11	Mobil Operasional	3 unit
12	Scanner	4 unit
13	Gergaji Mesin	3 unit
14	Laptop	18 unit
15	Meja Kounter Pelayanan	1 unit
16	UPS / BATERAI	6 unit
17	Mesin FAX	1 unit
18	KURSI Staf	10 unit
19	AC (AIR CONDISIONER)	15 unit
20	ALMARI ARSIP	24 unit

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
21	TV LED	3 unit
22	Kulkas	4 unit
23	Mesin Antrian	2 unit
24	Almari Locker	1 unit
25	Dispenser Air Minum	6 unit
26	Kursi Tunggu	4 unit
27	Komputer Tablet	2 unit

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan per Agustus 2025

Tabel 2.8
Aset Tanah Kecamatan Semarang Selatan

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	77	1998	Jl. Wonodri Baru I/1 RT.02 RW.02 Kel. Wonodri Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	12/17/2022	HP 103	Rumah dinas lurah	Pembelian	802.000	- Lain-Lain - 50.04.06.00
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	482	2001	Jl Nanas 8 RT.06 RW.07 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	04/07/2007	HP 10	Rumah dinas Lurah	Pembelian	41.590.000	- Lain-Lain - 50.04.10.00
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	104	2010	Jl. Penaton raya No.1 RT.02 RW.02 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	4/20/2007	HP 24	Rumah dinas lurah barusari	Pembelian	54.100.000	- Lain-Lain - 50.04.03.00
4	Tanah Kaveling (dst)	286	2011	Jl suyudono no 198	Hak Pakai			Rumah Sewa	Pembelian	209.352.000	pelimpahan dari DTKP
5	Tanah Kaveling (dst)	160	2011	Jl suyudono no 196	Hak Pakai			Rumah Sewa	Pembelian	117.120.000	pelimpahan dari DTKP
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	79	1979	Jl. Lemah Gempal VI a RT. 06 RW.04 Kel Barrusari Kec Smg Selatan	Hak Pakai	20/04/2007	12	Kantor Kelurahan	Pembelian	48.506.000	
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	765	1979	Jl. Pleburan Barat No. 11 RT.03 RW.02 Kel Pleburan Kec Smg Selatan	Hak Pakai	20/04/2007	29	Kantor Kelurahan	Pembelian	537.030.000	
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	315	1998	Jl. Nanas RT.04 RW.01 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	04/07/2007	HP 16	Gedung PKK	Pembelian	187.000.000	harga sama dengan HP No. 17 - Lain-Lain - 50.04.10.00
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	121	1970	Jl. Bulustalan II/273 RT.05 RW.01 Kel. Bulustalan Kec.Semarang Selatan	Hak Pakai	20/04/2007	HP 1	Tanah kantor Kelurahan Bulustalan	Pembelian	100.000.000	- Lain-Lain - 50.04.02.00
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	251	1977	Jl. Pandean Lamper II/29 RT.07 RW.08 kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	07/04/2007	HP 26	kantor kelurahan Peterongan	Pembelian	246.893.400	- Ex-Bengkok - 50.04.07.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	214,5	1998	Jl. Wonodri Baru I/1 RT.02 RW.02 Kel. Wonodri Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	17/12/2022	HP 103	Kantor kelurahan Wonodri	Pembelian	802.000	- Lain-Lain - 50.04.06.00
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	663	1998	Jl. Nanas Raya RT.04 RW.01 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	07/04/2007	HP 15	Balai Kelurahan	Pembelian	369.000.000	harga sama dengan HP No. 17 - Lain-Lain - 50.04.10.00
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	532	1998	Jl. Nanas No.8 RT.04 RW.01 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	07/04/2007	HP 17	kantor kelurahan	Pembelian	175.000.000	- Lain-Lain - 50.04.10.00
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	200	1979	Jl. Nanas Dalam I RT.06 RW.07 Kel Lamper Tengah Kec Smg Selatan	Hak Pakai	07/04/2007	11	Pos Keamanan Kelurahan	Pembelian	10.000.000	
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	244	2001	Jl. Randusari Pos II/155 RT.04 RW.01 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	30/04/2007	HP 7	Kantor Kelurahan Randusari	Pembelian	122.000.000	- Lain-Lain - 50.04.05.00
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	387	1979	Jl. Kedondong Dalam IV Rt, 03 RW.04 Kel Lamper Tengah Kec Smg Selatan	Hak Pakai	04/07/2007	9	Balai RW IV	Pembelian	30.960.000	
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	529	2001	Jl. Durian Barat 31 RT.04 RW.01 Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang selatan	Hak Pakai	07/04/2007	HP 10	RUMAH DINAS LAMPER KIDUL	Pembelian	631.499.000	- Lain-Lain - 50.04.09.00
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1583	1979	Jl. Durian Barat No. 31 RT.04 RW.01 kel Lamper Tengah Kec Smg Selatan	Hak Pakai	07/04/2007	8	Kantor Kelurahan	Pembelian	269.110.000	
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	416	2002	Jl. Bojongstalan No.307 RT.03 RW.03 Kel. Bulustalan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	26/07/2007	HP 2	Balai Kelurahan Bulustalan	Pembelian	754.000.000	- Lain-Lain - 50.04.02.00
20	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,273	2024	Jl. Nanas RT. 05 RW.01 Kelurahan lamper tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang	Hak Pakai		13		Pembelian	3.723.525.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	176	2007	Jl. Mugas Dalam VIII RT.05 RW.04 Kel. Mugassari Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	4/20/2007	HP 21	kantor kelurahan Mugasari	Pembelian	125.000.000	- Lain-Lain - 50.04.04.00
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	500	2021	Jl. Bojongstalan No. 307 RT 03 RW 03 Kel. Bulustalan Kec. Semarang SelatanJl. Mugasari Dalam RT.04 RW.01 Kel Mugassari Kec Smg Selatan	Hak Pakai		HP 00041	Kantor Kelurahan Bulustalan	Pembelian	229.000.001	(Blm Tercatat) Kantor Kelurahan Bulustalan Baru
23	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	210	1979	Jl. Mugasari Dalam RT.04 RW.01 Kel Mugassari Kec Smg Selatan	Hak Pakai	31/07/2007	24	Balai RW I	Pembelian	21.630.000	
24	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	936	2009	Jl Cempedak Raya 8A RT05 RW 01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	23/12/2020	HP 20	Kantor dan Balai Kel Lamper Lor	Pembelian	711.500.000	Hasil Penilain Tahun 2009 - Lain-Lain - 50.04.08.00
25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	91	1979	Jl. Mugas Dalam II RT.01 RW.01 Kel Mugassari Kec Smg Selatan	Hak Pakai	31/07/2007	25	Rumdin Lurah	Pembelian	9.373.000	
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	204	2009	Jl Cempedak Utara RT 02 RW 01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	16/12/2020	HP 17	Balai RW. I	Pembelian	279.100.000	Hasil Penilaian Tahun 2009 - Lain-Lain - 50.04.08.00
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	267	2009	Jl Rambutan I RT 01 RW 05 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	30/12/2020	HP. 21	Balai RW V	Pembelian	319.900.000	Hasil Penilain Tahun 2009 - Lain-Lain - 50.04.08.00
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1273	2024	Jl. Cempedak Raya RT. 05 RW.01 Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang	Hak Pakai		13	Kantor Kelurahan Lamper Lor	Pembelian	3.723.525.000	
29	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	669	1967	Jl. Pandean Lamper II/27 RT.07 RW.08 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	04/07/2007	HP 27	Balai Kelurahan Dan Rumah Dinas Peterongan	Pembelian	331.695.000	- Ex-Bengkok - 50.04.07.00
30	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	137	2024	Jl. Bergota krajan RT.07 RW.06	Hak Pakai				Pembelian	255.094.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	310	1993	Jl. Pandean Lamper IV/161 RT.03 RW.06 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	07/04/2007	HP 25	Balai RW VI	Pembelian	157.248.000	- Ex-Bengkok - 50.04.07.00
32	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	244	1998	Jl. Wonodri Baru I/1 RT.02 RW.02 Kel. Wonodri Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	17/12/2022	HP 103	Balai kelurahan	Pembelian	802.000	- Lain-Lain - 50.04.06.00
33	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	387	2001	Jl. Kedondong Dalam IX RT 5 RW 4 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	07/04/2007	HP 12	Balai RT.05 /LAPANGAN BADMINTON	Pembelian	135.000.000	- Lain-Lain - 50.04.10.00
34	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1382	2010	Jl. Mugas Barat XI RT.01 RW.03 Kel. Mugassari Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	31/07/2007	HP 23	Balai RW.III Mugassari	Pembelian	127.700.000	- Lain-Lain - 50.04.04.00
35	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	239	2024	Jl. Mugas dalam IX RT.04 RW.04 Kelurahan Mugasari Kec Smg Selatan	Hak Pakai				Pembelian	1.100.595.000	
36	Tanah Bangunan Balai Nikah	549	2001	Jl. Nanas No.8 RT.04 RW.01 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	07/04/2007	HP 13	KUA Semarang Selatan	Pembelian	100.500.000	- - 50.04.10.00
37	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	304	2011	Jl Cempedak Utara RT.04 RW.01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	16/12/2020	HP 16	Rumah Dinas Lurah Lamper Lor (Ex`s Kantor LKMD)	Pembelian	231.500.000	Limpahan DPKAD - Lain-Lain - 50.04.08.00
38	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1710	2001	Jl. Lamper Tengah XV RT.04 RW.01 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	04/07/2007	HP 14	masjid Jami`	Pembelian	670.000.000	- Ex-Bengkok - 50.04.10.00
39	Tanah Untuk Bangunan Masjid	522	1979	Jl, Kedondong Tengah No.13 RT.04 RW.04Jl, Kel Lamper Tengan Kec Smg Selatan	Hak Pakai	04/07/2007	18	Masjid An Nur	Pembelian	52.200.000	
40	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	160	2001	Jl. Randusari Pos II RT.04 RW.01 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Lapangan bulu tangkis	Pembelian	80.000.000	- Lain-Lain - 50.04.05.00
41	Tanah Lapangan Sepak Bola	900	2001	Jl. Kedondong Dalam RW. IV (perbatasan RT.06 RW.05 dan RT.03-RT.04 RW.04) Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai			Lapangan Taman Kedondong	Pembelian	3.060.000.000	- Ex-Bengkok - 50.04.10.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Tanah Lapangan Sepak Bola	9059	2001	Jl Lamper Tengah XV RW I Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	12/16/2020	HP 21	Lapangan sepak bola/FUTSL/ Bola Volly	Pembelian	484.500.000	- Lain-Lain - 50.04.10.00
43	Tanah Lapangan Bola Volly	200	2001	Jl. Cempedak Raya 8A RT.05 RW.01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	16/12/2020	HP 18	lapangan Volly	Pembelian	221.000.000	- Lain-Lain - 50.04.08.00
44	Tanah Lapangan Bola Volly	379	2009	Jl Taman Cempedak Utara RT 06 RW I Cempedak Utara Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	12/22/2020	HP 19	Lapangan Voli	Pembelian	695.000.000	Hasil Penilaian Tahun 2009 - Lain-Lain - 50.04.08.00
45	Tanah Lapangan Lainnya	1607	1979	Jl. Durian Barat RT.04 RW.01 Kel Lamper Kidul Kec Smg Selatan	Hak Pakai	04/07/2007	9	Lapangan Garot	Pembelian	273.190.000	
46	Tanah Bangunan Air lainnya	9	2001	Jl. Randusari Pos II RT.04 RW.01 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Sumur pemadam kebakaran	Pembelian	4.500.000	- Lain-Lain - 50.04.05.00
47	Tanah Untuk Makam lainnya	3795	1979	Jl. Kertanegara Selatan RT.04 RW.02	Hak Pakai	29/11/2010	43	Makam Sukolilo	Pembelian	284.625.000	
48	Tanah Untuk Makam lainnya	5939	2024	Jl. Sompok RT04 RW.04 kelurahan peterongan Kecamatan semarang selatan Kota semarang	Hak Pakai				Pembelian	36.792.105.000	
49	Tanah Lapangan Taman lainnya	200	1990	Jl. Atmodirono I RT.03 RW.10 Kel. Wonodri Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Taman Atmodirono	Pembelian	1.086.200	- Lain-Lain - 50.04.06.00
50	Tanah Lapangan Taman lainnya	947	1998	Jl. Sugio Pranoto RT.01 RW.01 Kel. Bulustalan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	7/26/2007	HP 5	Taman	Pembelian	2.392.000.000	- Lain-Lain - 50.04.02.00
51	Tanah Lapangan Taman lainnya	940	1998	Jl. Taman Blimbing RT.02 RW.04 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	04/07/2007	HP 28	Taman Blimbing	Pembelian	1.131.000.000	- Lain-Lain - 50.04.07.00
52	Tanah Lapangan Taman lainnya	803	1998	Jl Imam Barjo RT.08 RW.04 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	08/07/2007	HP 37	Taman	Pembelian	1.602.000.000	harga sama dengan no hp 36 - Lain-Lain - 50.04.11.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Tanah Lapangan Taman lainnya	607	1998	Jl. Taman Imam Barjo Depan Kantor Pos RT.08 RW.04 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	08/07/2007	HP 38	Taman	Pembelian	1.221.000.000	harga sama dengan no hp 36 - Lain-Lain - 50.04.11.00
54	Tanah Lapangan Taman lainnya	379	1998	Jl. Taman Imam Barjo RT.08 RW.04 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	08/07/2007	HP 36	Taman Imam Barjo	Pembelian	3.576.000.000	- Lain-Lain - 50.04.11.00
55	Tanah Lapangan Taman lainnya	335	2001	Jl. Erlangga III RT.09 RW.04 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	31/07/2007	HP 35	Taman Pleburan	Pembelian	865.000.000	- Lain-Lain - 50.04.11.00
56	Tanah Lapangan Taman lainnya	118	2001	Jl. Erlangga Barat I RT. 09 RW.04 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	11/29/2000	HP 26	Taman Erlangga	Pembelian	354.000.000	- Lain-Lain - 50.04.11.00
57	Tanah Lapangan Taman lainnya	103	2001	Jl. Erlangga Barat VII RT.06 RW.04 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan	Hak Pakai	31/07/2007	HP 34	Taman PKK	Pembelian	206.000.000	- Lain-Lain - 50.04.11.00
58	Tanah Lapangan Taman lainnya	366	2001	Jl. Singosari Raya RT.08 RW.06 Kel. Pleburan Kec.Semarang Selatan	Hak Pakai	7/31/2007	HP 32	Taman Hayam Wuruk	Pembelian	686.000.000	- Lain-Lain - 50.04.11.00
59	Tanah Lapangan Taman lainnya	101	2024	Jl. Gergaji I RT. 04. RW. 05 Kelurahan Mugasari Kec Smg Selatan	Hak Pakai				Pembelian	378.245.000	
60	Tanah Lapangan Taman lainnya	97	2024	Jl. Taman Mugas II RT.03 RW. 01 Kelurahan Mugasari Kec Smg Selatan	Hak Pakai				Pembelian	363.265.000	
61	Tanah Lapangan Taman lainnya	166	2024	Jl. Mugas Barat XI RT.01 RW. 03 Kelurahan Mugasari Kec Smg Selatan	Hak Pakai		HP 00110	Tanah Taman dan Tempat Parkir	Pembelian	764.430.000	
62	Tanah Kampung	7164	2001	Jl. Lamper Tengah XV (RT.04 dan 06 RW.01) Kel. Lamper Tengah Kec.Semarang Selatan	Hak Pakai			dihuni warga	Pembelian	2.399.940.000	- Ex-Bengkok - 50.04.10.00
63	lapangan lainnya lainnya (dst)	922	1979	Jl. Manggis /Jl. Taman Sompok no. 1 RT.08 RW.03	Hak Pakai	2/18/1999	12	taman	Pembelian	224.046.000	

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan per Agustus 2025

Tabel 2.9
Gedung dan Bangunan Kecamatan Semarang Selatan

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	300	Jl. Wonodri Sendang RT.05 RW.05 Kelurahan Wonodri, Wonodri, Smg Sltn			Pembelian	148.560.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Jl. Bendungan RT.04 RW.05 Kelurahan Barusari, Barusari, Smg Sltn			Pembelian	49.286.000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Jl. Lemah Gempal 4 A RT 06 RW.04 Kelurahan Bulustalan, Bulustalan, Smg Sltn			Pembelian	55.084.136
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Jl. Lemah Gempal 4 b RT 05 RW.04 Kelurahan Bulustalan, Bulustalan, Smg Sltn			Pembelian	45.546.864
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	90	Jl. Lemah Gempal 4 b RT 05 RW.04 Kelurahan Bulustalan, Bulustalan, Smg Sltn			Pembelian	23.516.477
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	60	Jl. Suyudono RT.01 RW.04 Kelurahan Barusari, Barusari, Smg Sltn			Pembelian	19.788.849
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Jl. Kalisari Baru RT.06 RW.05 Kelurahan Barusari, Barusari, Smg Sltn			Pembelian	41.031.674
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	90	Jl. Kalisari Baru RT.06 RW.05 Kelurahan Barusari, Barusari, Smg Sltn			Pembelian	38.966.000
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	90	Jl. Wonodri Krajan RT.01 RW.01 Kelurahan Wonodri, Wonodri, Smg Sltn			Pembelian	29.580.000

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	54	Jl. Taman Sompok			Pembelian	149.676.085
11	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Baik	37.5	JL. DURIAN BARAT NO. 31 KEL LAMPER KIDUL KEC SEMARANG SELATAN		Tanah Milik Pemda	Pembelian	208.505.152
12	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	12	Jl. Lamper Tengah XV B RT 006 RW 001 Kel. Lamper Tengah		Tanah Milik Pemda	Pembelian	14.882.000
13	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	60	Jl. MUGAS DALAM IX RT 04 RW 04 KEL. MUGASARI			Pembelian	108.128.768
14	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	60	JL. KEDONDONG DALAM IV RW, 04 KEL LAMPER TENGAH			Pembelian	124.559.730
15	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Baik	651	Jl. Bancar Asri III			Pembelian	1.399.899.079
16	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	1849	Taman Banjar Kel Lamper Tengah		Tanah Milik Pemda	Pembelian	45.154.856
17	Bangunan Pasar lain-lain (dst)	Baik	106	JL. BANCAR ASRI KEL LAMPER TENGAH			Pembelian	325.756.049
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Bojongstalan 307 Kelurahan Bulustalan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	204.806.466
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	81	Jl. lemah gempal VI A		Tanah Milik Pemda	Pembelian	212.544.770
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	171	Jl. Mugas Dalam		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.286.650.511
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	300	Jl. Randusari Pos II / 155		Tanah Milik Pemda	Pembelian	252.098.633
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	119	Jl. Wonodri Baru I / 1		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.013.115.731
23	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	187	Jl. pandean Lamper II / 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	123.711.629
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	154	Jl. Cempedak Raya No.8A		Tanah Milik Pemda	Pembelian	255.760.000
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	130	Jl. Durian Barat 31		Tanah Milik Pemda	Pembelian	420.647.555

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
26	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	500	Jl. nanas No.8		Tanah Milik Pemda	Pembelian	226.495.581
27	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	15	JL. Manggis IX RT.09 RW.03 Kelurahan Lamper Lor			Pembelian	31.347.333
28	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	Kurang Baik	105	Jl. Bulustalan II / 273		Tanah Milik Pemda	Pembelian	393.411.331
29	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	Kurang Baik	45	Jl. Wonodri Baru I / 1		Tanah Milik Pemda	Pembelian	54.000.000
30	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	Baik	296	Jl. Cempedak Utara No. 14		Tanah Milik Pemda	Pembelian	355.392.368
31	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	Baik	175	Jl. Durian I / 1		Tanah Milik Pemda	Pembelian	27.630.000
32	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	Baik	132	Jl. Nanas No.8		Tanah Milik Pemda	Pembelian	41.590.000
33	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	Baik	54	Jl. Kertanegara Selatan 11		Tanah Milik Pemda	Pembelian	33.750.000
34	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	Baik	94	Jl. Mugas Dalam II / 16		Tanah Milik Pemda	Pembelian	133.620.000
35	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Kurang Baik	96	Jl. penaton raya No. 1		Tanah Milik Pemda	Pembelian	43.877.607
36	Tugu Pembangunan	Baik	70	Jl. Cempedak Utara RT. 02 RW. I		Tanah Milik Pemda	Pembelian	40.000.000
37	Rumah Adat	Kurang Baik	118	Jl. Jeruk VIII RT 11 RW 4 Kelurahan lamper lor		Tanah Milik Pemda	Pembelian	169.206.750
38	Rumah Adat	Baik	60	Jl. Mugas Dalam VIII		Tanah Milik Pemda	Pembelian	133.620.000
39	Rumah Adat	Kurang Baik	242	Jl. Wonodri Baru I / 1		Tanah Milik Pemda	Pembelian	90.400.000
40	Rumah Adat	Baik	120	Jl. Pandean Lamper II / 27		Tanah Milik Pemda	Pembelian	140.947.507
41	Rumah Adat	Kurang Baik	45	Jl. Pandean Lamper II / 27		Tanah Milik Pemda	Pembelian	54.000.000
42	Rumah Adat	Baik	29	Jl. Pandean Lamper II / 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	34.510.000

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
43	Rumah Adat	Baik	224	Jl. Pandean Lamper IV / 161		Tanah Milik Pemda	Pembelian	620.917.211
44	Rumah Adat	Baik	237	Jl. Cempedak Raya No.8A		Tanah Milik Pemda	Pembelian	413.658.001
45	Rumah Adat	Baik	253	Jl. Cempedak Raya RT 5 RW 1 Kelurahan Lamper Lor		Tanah Milik Pemda	Pembelian	400.524.924
46	Rumah Adat	Baik	323	Jl. Manggis VII		Tanah Milik Pemda	Pembelian	670.318.726
47	Rumah Adat	Baik	112	Jl. Rambutan I		Tanah Milik Pemda	Pembelian	93.300.000
48	Rumah Adat	Baik	200	Jl. Durian Barat 31		Tanah Milik Pemda	Pembelian	466.657.000
49	Rumah Adat	Baik	71.5	Jl. Durian Barat 31		Tanah Milik Pemda	Pembelian	154.674.834
50	Rumah Adat	Baik	15	Jl. Durian Barat 31		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.000.000
51	Rumah Adat	Baik	108	Jl. Durian Barat 31		Tanah Milik Pemda	Pembelian	25.600.000
52	Rumah Adat	Baik	500	Jl. Nanas No.8		Tanah Milik Pemda	Pembelian	184.968.992
53	Rumah Adat	Baik	2000	Jl. Nanas No.8		Tanah Milik Pemda	Pembelian	235.760.660
54	Rumah Adat	Baik	108	Jl. Kedondong Dalam VIII RT 5 RW 4 Kelurahan Lamper Tengah		Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.600.000
55	Rumah Adat	Baik	6000	Jl Kedondong Dalam VI		Tanah Milik Pemda	Pembelian	46.800.000
56	Rumah Adat	Baik	140	Jl. Kertanegara Selatan 11		Tanah Milik Pemda	Pembelian	31.500.000
57	Rumah Adat	Baik	84	Jl. Mugas dalam IX No. 35		Tanah Milik Pemda	Pembelian	75.800.000
58	Rumah Adat	Baik	150	Jl. Erlangga Tengah II RT.05 RW.04 Kel			Pembelian	97.816.000
59	Pagar Permanen	Baik	9392	Banjar Asri Kel Lamper Tengah		Tanah Milik Pemda	Pembelian	32.326.772

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
60	Pagar Permanen	Baik	120	Perbaikan Pagar Kantor Kecamatan Semarang Selatan Jl. Taman Sompok Semarang			Pembelian	155.050.000
61	Pagar Permanen	Baik	30	Jl. Lemah Gempal RT 9 RW 4 Kelurahan Barusari			Pembelian	65.409.000
62	Pagar Permanen	Baik	25	Jl. Cokroaminoto RT. 01 RW. 03 KEL. BARUSARI			Pembelian	84.322.000
63	Tugu/tanda batas lainnya	Baik	40	Jl. Barusari Baru RT.5 RW.03 Kelurahan Barusari			Pembelian	52.140.000

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan per Agustus 2025

II.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

A. Capaian Kinerja Kecamatan Semarang Selatan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Pada dokumen Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Kecamatan Semarang Selatan di bidang kewilayahan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021-2026 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA					REALISASI					RASIO CAPAIAN (%) PADA TAHUN KE-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,00	87,00	88,00	89,00	85,00	87,00	87,00	97,82	99,49	100,00	100,00	100,00	111,16	111,79
2	Nilai AKIP	70,00	71,55	75,25	77,70	79,60	70,11	70,15	70,36	76,75	77,15	100,16	98,04	93,50	98,78	96,92
3	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80.00	100,00	100,00	100,00	100,00	80.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	10,00	10,00	15,00	20,00	N/A	81,68	83,36	85,00	86,72	N/A	816,80	833,60	566,67	433,60
6	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	N/A	87,00	90,00	92,00	95,00	N/A	85,00	90,00	100,00	95,00	N/A	97,70	100,00	108,70	100,00
7	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Tersedianya Saran dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Pelayananan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)	85	85,00	91,00	92,00	93,00	85,00	85,00	91,00	99,68	99,49	100,00	100,00	100,00	108,35	106,98
11	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94.00	95,00	97,00	98,00	99,00	94.00	95,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	10,00	10,00	15,00	20,00	N/A	10,00	10,00	17,10	20,00	N/A	100,00	100,00	114,00	100,00
13	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A	85,00	90,00	92,00	95,00	N/A	85,00	90,00	100,00	95,00	N/A	100,00	100,00	108,70	100,00

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan 2025

B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Semarang Selatan

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2020-2024 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang menerima total alokasi anggaran sebesar Rp 156.611.161.527,- dengan realisasi sebesar Rp 176.532.694.901,- (88,72%). Secara rinci anggaran beserta realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaksanaan Urusan
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	JUMLAH BELANJA	27.686.653.069	36.557.072.011	33.189.421.170	38.871.782.141	40.227.766.510	15.718.815.056	34.248.245.638	32.088.940.236	37.425.388.615	37.129.771.982	95,55	93,68	96,68	96,28	92,30	10,86	31,85
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.023.586.000	0	0	0	0	8.786.817.756	0	0	0	0	97,38	0	0	0	0		
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	560.961.000	0	0	0	0	515.783.291	0	0	0	0	91,95	0	0	0	0		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	304.551.000	0	0	0	0	304.545.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0		
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	395.440.000	0	0	0	0	361.655.000	0	0	0	0	91,46	0	0	0	0		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	201.720.000	0	0	0	0	201.390.000	0	0	0	0	99,84	0	0	0	0		
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	19.214.000	0	0	0	0	11.212.500	0	0	0	0	58,36	0	0	0	0		
7	Program Peningkatan Partisipasi	5.206.654.000	0	0	0	0	5.089.066.509	0	0	0	0	97,74	0	0	0	0		

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan																	
8	Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	451.150.000	0	0	0	0	448.345.000	0	0	0	0	99,38	0	0	0	0		
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0	13.377.532.071	11.836.400.680	13.080.707.734	14.603.110.434	0	10.667.852.769	11.447.575.095	12.230.440.464	13.886.191.231	0	79,74	96.72	93,50	95,09		
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	8.999.663.990	2.898.844.000	2.661.893.770	3.293.638.370	0	10.667.852.769	2.689.388.427	2.565.901.154	3.109.370.803	0	90,35	92.77	96,39	94,41		
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	13.845.275.950	18.325.660.442	22.958.250.637	22.124.217.706	0	12.588.538.900	17.853.041.064	22.472.642.822	19.934.755.248	0	90,92	97,42	97,88	90,10		
12	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	334.600.000	96.115.448	87.930.000	105.000.000	0	324.001.200	67.491.450	73.701.525	103.377.200	0	96,83	70,22	83,82	98,45		
13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	32.400.600	83.000.000	101.800.000	0	0	31.444.200	82.702.650	96.077.500	0	0,00	97,05	99,64	94,38		

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan

II.1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

A. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Semarang Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam mengembangkan wilayah melalui perencanaan Pembangunan Kecamatan;
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan;
3. Potensi konflik sosial, gangguan keamanan, gangguan ketenteraman dan ketertiban yang mungkin terjadi di wilayah Kecamatan Semarang Selatan;
4. Kesiapan masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Selatan dalam pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik masih rendah.

B. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Semarang Selatan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Peran kecamatan dan kelurahan yang semakin besar dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Digitalisasi Pelayanan);
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui keterlibatan aktif bisa menjadi pengawas, pendorong peningkatan kayanan dan memotivasi perubahan.

II.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Semarang Selatan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Semarang Selatan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Semarang Selatan telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan.

II.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan

eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan Awal RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah "**Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan"**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Semarang Selatan terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu "**Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan".**

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah **"Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan"**.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif

   Data yang tersedia menunjukkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif belum optimal, dimana dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami peningkatan, yaitu sebesar 80,00% pada Tahun 2020; 95,00% pada Tahun 2021; 100,00% pada Tahun 2022; 100,00% pada Tahun 2023; serta 100,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan.

   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.

b. Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

   Dalam kurun waktu tahun 2021-2024, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional mengalami fluktuasi yaitu sebesar 85,00% pada Tahun 2021; 90,00% pada Tahun 2022, 100,00% pada Tahun 2023; serta 95,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.

   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan serta sinergitas lintas sektor dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang,

maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Selatan;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Selatan;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Selatan;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Selatan;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Selatan;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Selatan;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Selatan;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Selatan;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Selatan.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rumusan Permasalahan Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Selatan	belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Selatan
		belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Selatan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan
2	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Selatan	belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan
		belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan
		belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Selatan
		belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Selatan
		masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Selatan
3	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan
		belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Selatan
		belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan
		belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Selatan

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan 2025

II.2.2 TELAAHAN DOKUMEN LAINNYA

A. Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka

menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

B. Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih adalah sebagai berikut:

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif."

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang.

Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 16 kegiatan prioritas.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan**

Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 11 kegiatan prioritas.

Misi 3 **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.**

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 13 kegiatan prioritas.

Misi 4 **Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta

pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 12 kegiatan prioritas.

Misi 5 **Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 8 kegiatan prioritas.

Misi 6 **Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.**

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 26 kegiatan prioritas.

Misi 7 **Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.**

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Selatan mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu: **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif”** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.”**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat” (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Semarang Selatan mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat” (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran “Indeks Pelayanan Publik” (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran “meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang” (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran “Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu “Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah” (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Semarang Selatan mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Semarang Selatan dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

Gambar 2.6
Peranan Kecamatan Semarang Selatan dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

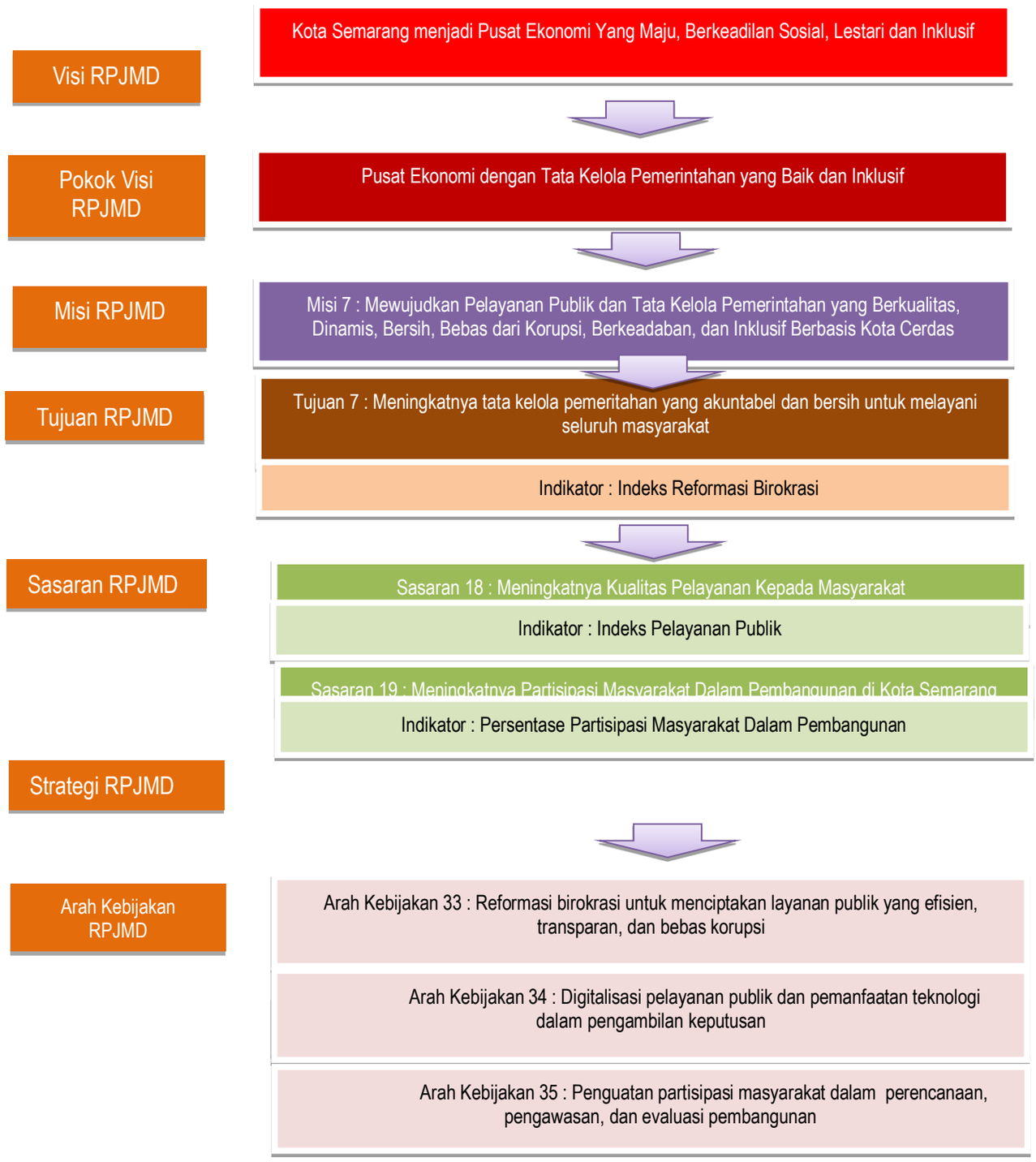

C. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga Dan Renstra Provinsi

Kecamatan Semarang Selatan secara langsung tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Namun secara tidak langsung Kecamatan Semarang Selatan berkaitan karena merupakan wilayah pelaksanana beberapa Kebijakan baik level Provinsi maupun level Nasional. Keterkaitan tersebut antara lain bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender

Kecamatan Semarang Selatan berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberi manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender (ARG) diproyeksikan sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Implementasi ARG juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.

2. Kota Layak Anak

Sebagai bagian dari Kota Semarang, Kecamatan Semarang Selatan mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terhadap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA.

3. Kecamatan Berdaya

Kecamatan Semarang Selatan diarahkan sebagai Kecamatan Berdaya yang mampu memperkuat tata kelola pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada optimalisasi potensi lokal, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui penguatan kapasitas aparatur serta kolaborasi multipihak, kecamatan diharapkan menjadi simpul penggerak pembangunan partisipatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Posyandu 6 Layanan SPM

Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat terus diperkuat untuk memenuhi 6 layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan. Kecamatan Semarang Selatan berupaya mendukung revitalisasi Posyandu agar lebih terintegrasi, inovatif, dan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan berkesinambungan.

5. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif. Kecamatan Semarang Selatan memiliki keragaman agama dan keyakinan yang tinggi, sehingga diperlukan penguatan dialog antarumat beragama, fasilitasi kegiatan keagamaan, dan dukungan terhadap forum-forum kerukunan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Upaya ini diarahkan untuk mencegah potensi konflik sosial, memperkuat kohesi sosial, dan membangun budaya toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

6. Kerukunan dan Harmonisasi Wilayah

Selain kerukunan umat beragama, harmonisasi wilayah menjadi isu strategis yang harus terus dijaga. Kecamatan Semarang Selatan sebagai kawasan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks menghadapi tantangan berupa potensi gesekan antarwarga, konflik kepentingan lahan, maupun perbedaan aspirasi pembangunan. Untuk itu, penguatan mekanisme mediasi, musyawarah, serta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan wilayah. Upaya harmonisasi ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

7. Ruang Bersama Indonesia

Ruang Bersama Indonesia Merupakan Program Kolaboratif yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Kemen PPPA) yang bertujuan menciptakan ekosistem aman dan inklusif untuk pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Semarang Selatan dapat mengidentifikasi arah (geogafis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Semarang Selatan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Semarang Selatan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembengan wilayah Kota Semarang berdasarkan Perturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut :

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra Kota Semarang adalah telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perencanaan yang merupakan perencanaan berbasis spasial ini meliputi seluruh wilayah Kota Semarang dengan luas keseluruhan sebesar lebih kurang 372,3 Km^2 atau 37230 Ha. Penataan ruang wilayah Kota Semarang ini bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Perencanaan tata ruang wilayah memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui:

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
c. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan startegis.

Kebijakan dan staregi pengembangan Struktur Ruang sebagai berikut:

a. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
   1) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional
   2) Peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
   3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.
b. Strategi Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional meliputi:
   1) Menerapkan hirarki sistem pusat pelayanann secara berjenjang;
   2) Mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
   3) Mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
   4) Mengembangakn kegiatan Pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
   5) Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
   6) Mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
c. Strategi peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan meliputi:
   1) Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota.
   2) Mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) jalan lingkar tengah (*middle ring road*), jalan lingkar luar (*outer ring road*), dan jalan radial;
   3) Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
   4) Mengembangkan sistem transportasi massal;
   5) Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
   6) Mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan Pelabuhan laut; dan
   7) Meningkatkan integrasi sistem antar moda
d. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum meliputi:
   1) Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
   2) Mengembangkan sistem prasarana energi;
   3) Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
   4) Mengembangkan prasarana sumber daya air;
   5) Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknikyang berwawasan lingkungan;
   6) Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
   7) Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
   8) Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
e. Kebijakan dan strategi Pengembangan Pola Ruang meliputi:
   1) Kebijakan dan startegi pengelolaan Kawasan lindung; dan
   2) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan budidaya
f. Kebijakan pengelolaan Kawasan lindung meliputi:

1) Peningkatan pengelolaan Kawasan yang berfungsi lindung; dan
2) Pelestarian Kawasan cagar budaya; dan
3) Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota.

g. Strategi peningkatan pengelolaan Kawasan yang berfungsi lindung meliputi:
1) Mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
2) Meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
3) Menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.

h. Strategi pelesatarian Kawasan Cagar Budaya meliputi:
1) Meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
2) Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah

i. Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota meilputi:
1) Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
2) Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
3) Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
4) Mengembangkan kegiatan *agroforestry* di kawasan pertanian lahankering yang dimiliki masyarakat;
5) Mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau;
6) Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

j. Kebijakan pengembangan Kawasan budidaya sebagimana dimaksud dalam meilputi:
1) Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
2) Pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien; dan
3) Pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.

k. Strategi pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung meilputi:
1) Mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di Kawasan bagian atas;
2) Mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
3) Membatasi pengembangan kawasan industri.

l. Strategi perwujudan pemanfaatan ruang kota yang kompak dan efisien meilputi:
1) Mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal dikawasan pusat kota; dan
2) Mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif

m. Strategi pengelolaan dan pengembangan Kawasan pantai meilputi:
1) Mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat;

2) Mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob; dan
3) Melakukan penghijauan kawasan pantai

n. Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:
1) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
2) Pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; dan
3) Pengembangan kawasan strategis sosial budaya.

o. Strategi pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi:
1) Menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan
2) Mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.

p. Strategi pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup meliputi:
1) Mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
2) Mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi denga memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
3) Meningkatkan nilai ekonomi dan nilai social kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.

q. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya meliputi:
1) Memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
2) Mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian; dan
3) Pengembangan kegiatan kepariwisataan.

r. Rencana struktur ruang meliputi:
1) Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
2) Rencana pengembangan sistem jaringan.

s. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan meliputi:
1) Rencana pembagian wilayah kota (BWK); dan
2) Rencana penetapan pusat pelayanan.

t. Rencana pengembangan sistem jaringan meliputi:
1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi;
3) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
4) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
5) Rencana pengembangan pengembangan sistem infrastruktur perkotaan; dan
6) Rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan lainnya

u. Rencana pembagian wilayah kota (BWK) meliputi:
1) BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar;
2) BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 1.320 (seribu tiga

ratus dua puluh) hektar;
3) BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara dengan luas kurang lebih 3.522 (tiga ribu lima ratus dua puluh dua) hektar;
4) BWK IV meliputi Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 2.738 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar;
5) BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan dengan luas kurang lebih 2.622 (dua ribu enam ratus dua puluh dua) hektar;
6) BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 4.420 (empat ribu empat ratus dua puluh) hektar;
7) BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 2.509 (dua ribu lima ratus sembilan) hektar;
8) BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati dengan luas kurang lebih 5.399 (lima ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan) hektar;
9) BWK IX meliputi Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 6.213 (enam ribu dua ratus tiga belas) hektar; dan
10) BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu dengan luas kurang lebih 6.393 (enam ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga) hektar.

v. Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing BWK meliputi
1) Perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, BWK II, BWK III;
2) Pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II;
3) Transportasi udara dan transportasi laut di BWK III;
4) Industri di BWK IV dan BWK X;
5) Pendidikan di BWK VI dan BWK VIII;
6) Perkantoran militer di BWK VII; dan
7) Kantor pelayanan publik di BWK IX.

E. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Semarang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara

lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (5) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan masalah strategis "**Belum optimalnya pelayanan public yang "transparan dan akuntabel**", dan isu strategis "**Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab**", seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.13
Tema isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

PILAR	MASALAH STRATEGIS	ISU STRATEGIS
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

II.2.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6)

Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan adalah isu strategis ke tujuh, yaitu “Penyelenggaraan Good Governance”. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu: “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Semarang Selatan, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Isu Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Selatan	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan *Good Governance*	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Semarang Selatan
		Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Selatan						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan
		Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan						Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Semarang Selatan.

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Semarang Selatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal "Reformasi Birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi"; "Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan"; "Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan".

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah "**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**", dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**.

III.1 Tujuan Renstra Kecamatan Semarang Selatan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Semarang Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang peningkatan tata kelola pemerintahan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima

tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Semarang Selatan. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan"

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. **"Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Selatan"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).

2. **"Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Semarang Selatan"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

III.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dimana Kecamatan Semarang Selatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Semarang Selatan.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Semarang Selatan maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan

Dengan indikator sasaran yaitu :

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Selatan.**

   Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Selatan.**

   Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan**

Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Selatan**".

Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan**

Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan**".

Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Selatan melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Semarang Selatan.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat												
	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Selatan	Angka	94,50	95,0	96,70	96,73	96,76	96,79	96,82	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Selatan	Angka	74,95	74,96	74,97	74,98	74,99	75,00	75,10	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Selatan	Angka	94.62	89.50	94,50	94,55	94,60	94,65	94,70	
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Selatan	Persen	88,00	89,00	90,00	92,00	94	96	98	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Selatan	Angka	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan												
		SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan	Angka	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan 2025

III.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Semarang Selatan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

III.3.1 STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Semarang Selatan dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Tahun 2025-2029

STRATEGI	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan	√	√	√	√	√

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan 2025

III.3.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Selatan;
(b) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Selatan;
(c) peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(d) peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan;
(e) peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
(f) peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan;
(g) peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Selatan;
(h) peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Selatan;
(i) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Selatan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban

Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan;
(b) peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Selatan;
(c) peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan;
(d) peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Selatan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Selatan	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Selatan	
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan	
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan	
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Selatan	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Selatan	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Selatan	

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Selatan	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Selatan	

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Selatan
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Selatan
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Selatan
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Selatan
			6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Selatan

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Selatan
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Selatan
			3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Selatan

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Semarang Selatan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Semarang Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan**				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan**		Camat
		S1:Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan			**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Selatan**		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Selatan		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan		**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas**	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Sekcam
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan		Sekcam
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Selatan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag PEK
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staff PEK
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staff PEK

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staff PEK
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staff PEK
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staff PEK
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staff PEK
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	X.XX.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staff PEK
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag PEK
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staff PEK
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staff PEK

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staff PEK
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staff PEK
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staff PEK
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Selatan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umpeg
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	X.XX.01.1.05. 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umpeg
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.1.05. 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umpeg
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan	X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umpeg
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umpeg

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umpeg
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umpeg
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umpeg
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umpeg
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umpeg
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umpeg
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan yang selesai ditindaklanjuti	X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umpeg
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umpeg
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umpeg
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan sesuai ketentuan	X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umpeg

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umpeg
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umpeg
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umpeg
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan			**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan Semarang Selatan**		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu**	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Kesos Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Kesos Kecamatan
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kasi Pemerintahan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Pemerintahan Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kasi Pelayanan Publik Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staff Pelayanan Publik Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Tengah		Lurah Lamper Tengah
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Lamper Tengah
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Lor		Lurah Lamper Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Lamper Lor
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Kidul		Lurah Lamper Kidul
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Lamper Kidul
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Peterongan		Lurah Lamper Kidul
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Peterongan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonodri		Lurah Kelurahan Wonodri

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Kelurahan Wonodri
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pleburan		Lurah Pleburan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Pleburan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mugassari		Lurah Mugassari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Mugassari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Randusari		Lurah Randusari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Randusari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Barusari		Lurah Barusari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Barusari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bulustalan		Lurah Bulustalan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Bulustalan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pembangunan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Tengah		Lurah Lamper Tengah
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Tengah	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Lamper Tengah
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Lor		Lurah Lamper Lor
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Lor	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Lamper Lor
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Kidul		Lurah Lamper Kidul
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Kidul	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Lamper Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Peterongan		Lurah Lamper Kidul
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Peterongan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Peterongan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonodri		Lurah Kelurahan Wonodri
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Wonodri	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Kelurahan Wonodri
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pleburan		Lurah Pleburan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pleburan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Pleburan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat i Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mugassari		Lurah Mugassari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mugassari	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Mugassari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Randusari		Lurah Randusari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Randusari	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Randusari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Barusari		Lurah Barusari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Barusari	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Barusari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulustalan		Lurah Bulustalan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bulustalan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Bulustalan
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan**	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantibum Kecamatan
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Trantibum Kecamatan
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Pemerintahan Kecamtan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Pemerintahan Kecamtan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang		**S3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan**			**Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan**		Camat
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kasi Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan		Kasi Pembangunan Kecamatan, Kasi Kesos Kecamatan dan Lurah
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Pembangunan/ Staf Kesos Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Tengah		Lurah Lamper Tengah
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Lamper Tengah
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Lor		Lurah Lamper Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Lamper Lor
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bulustalan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Kidul		Lurah Lamper Kidul
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Lamper Kidul
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Peterongan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peterongan		Lurah Lamper Kidul
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Peterongan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Wonodri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonodri		Lurah Kelurahan Wonodri
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Wonodri
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pleburan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pleburan		Lurah Pleburan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Pleburan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mugassari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mugassari		Lurah Mugassari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Mugassari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Randusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Randusari		Lurah Randusari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Randusari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Barusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Barusari		Lurah Barusari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Barusari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bulustalan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulustalan		Lurah Bulustalan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Bulustalan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kecamatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi Kesos/ Kasi Pemerintahan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Kesos Kecamatan, dan Staf Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Lamper Tengah		Lurah Lamper Tengah
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Lamper Tengah
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Lamper Lor		Lurah Lamper Lor
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Lamper Lor
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Lamper Kidul		Lurah Lamper Kidul
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Lamper Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Peterongan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Peterongan		Lurah Lamper Kidul
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Peterongan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonodri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Wonodri		Lurah Kelurahan Wonodri
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Wonodri
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pleburan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Pleburan		Lurah Pleburan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Pleburan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mugassari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Mugassari		Lurah Mugassari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Mugassari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Randusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Randusari		Lurah Randusari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Randusari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Barusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Barusari		Lurah Barusari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Barusari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bulustalan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Bulustalan		Lurah Bulustalan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemrintahan / Trantibum Kelurahan Bulustalan
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		Kasi Kesos Kecamatan
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Kesos Kecamatan
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kasi Kesos Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Kesos Kecamatan

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan 2025

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5.	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil			
7.	Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi			
8.	Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan 2025

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KEWILAYAHAN													
7.01 KECAMATAN SEMARANG SELATAN				**46.369.279.943**		**48.980.087.197**		**49.940.031.819**		**50.125.353.950**		**50.542.456.582**	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas**	**100,00%**	**100,00%**	**15.741.243.179**	**100,00%**	**17.525.316.917**	**100,00%**	**18.301.828.851**	**100,00%**	**18.444.463.059**	**100,00%**	**18.780.907.617**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan OPD yang berkualitas**	**100,00%**	**100,00%**	**16.863.398.061**	**100,00%**	**18.647.471.799**	**100,00%**	**19.423.983.733**	**100,00%**	**19.566.617.941**	**100,00%**	**19.903.062.499**	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	**96,00%**	**96,67**		**97,00**		**97,33**		**97,67**		**98,00**		
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**56.369.000**		**71.025.400**		**78.444.500**		**132.444.500**		**140.444.500**	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Selatan beserta pelaporan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00%**	**100,00%**	**56.369.000**	**100,00%**	**71.025.400**	**100,00%**	**78.444.500**	**100,00%**	**132.444.500**	**100,00%**	**140.444.500**	
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.488.900		5.488.900		8.000.000		55.000.000	4 Dokumen	56.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	4 Dokumen	3.488.900	4 Dokumen	5.488.900	4 Dokumen	8.000.000	6 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	56.000.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.347.800		2.107.300		2.488.900		3.488.900		4.488.900	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.347.800	1 Dokumen	2.107.300	1 Dokumen	2.488.900	1 Dokumen	3.488.900	1 Dokumen	4.488.900	Kecamatan Semarang Selatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.347.800		2.107.300		2.488.900		3.488.900		4.488.900	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.347.800	1 Dokumen	2.107.300	1 Dokumen	2.488.900	1 Dokumen	3.488.900	1 Dokumen	4.488.900	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.347.800		2.107.300		2.488.900		3.488.900		4.488.900	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.347.800	1 Dokumen	2.107.300	1 Dokumen	2.488.900	1 Dokumen	3.488.900	1 Dokumen	4.488.900	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.347.800		2.107.300		2.488.900		3.488.900		4.488.900	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.347.800	1 Dokumen	2.107.300	1 Dokumen	2.488.900	1 Dokumen	3.488.900	1 Dokumen	4.488.900	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.488.900		2.107.300		2.488.900		3.488.900		4.488.900	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 Laporan	5 Laporan	3.488.900	5 Laporan	2.107.300	5 Laporan	2.488.900	5 Laporan	3.488.900	5 Laporan	4.488.900	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				44.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		62.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	N/A	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	58.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	62.000.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**14.092.927.829**		**14.799.640.140**		**15.540.439.729**		**16.320.078.503**		**16.516.392.779**	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00%**	**100,00%**	**14.092.927.829**	**100,00%**	**14.799.640.140**	**100,00%**	**15.540.439.729**	**100,00%**	**16.320.078.503**	**100,00%**	**16.516.392.779**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.694.718.629		14.379.444.240		15.098.406.029		15.853.315.803		16.023.816.079	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	81 Orang	95 Orang	13.694.718.629	95 Orang	14.379.444.240	95 Orang	15.098.406.029	95 Orang	15.853.315.803	95 Orang	16.023.816.079	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				394.165.800		413.874.000		434.567.000		456.296.000		479.110.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	394.165.800	12 Dokumen	413.874.000	12 Dokumen	434.567.000	12 Dokumen	456.296.000	12 Dokumen	479.110.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.347.800		2.107.300		2.488.900		3.488.900		4.488.900	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1.347.800	1 Laporan	2.107.300	1 Laporan	2.488.900	1 Laporan	3.488.900	1 Laporan	4.488.900	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.347.800		2.107.300		2.488.900		3.488.900		4.488.900	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18 Laporan	12 Laporan	1.347.800	12 Laporan	2.107.300	12 Laporan	2.488.900	12 Laporan	3.488.900	12 Laporan	4.488.900	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.347.800		2.107.300		2.488.900		3.488.900		4.488.900	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.347.800	1 Dokumen	2.107.300	1 Dokumen	2.488.900	1 Dokumen	3.488.900	1 Dokumen	4.488.900	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**35.151.032**		**100.500.000**		**104.200.000**		**108.000.000**		**109.700.000**	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Selatan	**Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan**	**N/A**	**89 Angka**	**35.151.032**	**91 Angka**	**100.500.000**	**92 Angka**	**104.200.000**	**93 Angka**	**108.000.000**	**94 Angka**	**109.700.000**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.XX.01.1.05. 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		15.500.000		18.500.000		21.500.000		22.500.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	N/A	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	15.500.000	4 Dokumen	18.500.000	4 Dokumen	21.500.000	4 Dokumen	22.500.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.05. 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.151.032		85.000.000		85.700.000		86.500.000		87.200.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	N/A	350	25.151.032	350	85.000.000	350	85.700.000	350	86.500.000	350	87.200.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				**546.911.200**		**1.159.755.500**		**1.174.893.000**		**1.053.636.000**		**865.626.000**	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan**	**100,00%**	**100,00%**	**546.911.200**	**100,00%**	**1.159.755.500**	**100,00%**	**1.174.893.000**	**100,00%**	**1.053.636.000**	**100,00%**	**865.626.000**	
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				101.390.000		225.459.500		230.458.000		234.750.000		236.750.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	12 Paket	101.390.000	12 Paket	225.459.500	12 Paket	230.458.000	12 Paket	234.750.000	12 Paket	236.750.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.936.000		57.733.000		58.725.000		62.725.000		64.725.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	6 Paket	35.936.000	6 Paket	57.733.000	6 Paket	58.725.000	6 Paket	62.725.000	6 Paket	64.725.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				137.721.000		144.607.000		146.585.000		159.429.000		160.429.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	137.721.000	12 Laporan	144.607.000	12 Laporan	146.585.000	12 Laporan	159.429.000	12 Laporan	160.429.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.395.200		109.614.000		110.750.000		120.850.000		122.850.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	64.395.200	12 Laporan	109.614.000	12 Laporan	110.750.000	12 Laporan	80.850.000	12 Laporan	122.850.000	Kecamatan Semarang Selatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				207.469.000		422.342.000		328.375.000		175.882.000		280.872.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4 Dokumen	207.469.000	4 Dokumen	422.342.000	4 Dokumen	328.375.000	4 Dokumen	175.882.000	4 Dokumen	280.872.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**184.065.000**		**258.268.250**		**265.931.000**		**158.840.000**		**129.500.000**	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan**	**100,00%**	**100,00%**	**184.065.000**	**100,00%**	**258.268.250**	**100,00%**	**265.931.000**	**100,00%**	**158.840.000**	**100,00%**	**129.500.000**	
X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				184.065.000		258.268.250		265.931.000		158.840.000		129.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	15 Unit	184.065.000	18 Unit	258.268.250	20 Unit	265.931.000	25 Unit	158.840.000	28 Unit	129.500.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**435.950.000**		**449.247.500**		**462.909.000**		**380.955.000**		**391.400.000**	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan yang selesai ditindaklanjuti**	**100,00%**	**100,00%**	**435.950.000**	**100,00%**	**449.247.500**	**100,00%**	**462.909.000**	**100,00%**	**380.955.000**	**100,00%**	**391.400.000**	
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.950.000		153.247.500		160.909.000		168.955.000		177.400.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	145.950.000	12 Laporan	153.247.500	12 Laporan	160.909.000	12 Laporan	168.955.000	12 Laporan	177.400.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.000.000		296.000.000		302.000.000		212.000.000		214.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	290.000.000	12 Laporan	296.000.000	12 Laporan	302.000.000	12 Laporan	212.000.000	12 Laporan	214.000.000	Kecamatan Semarang Selatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**389.869.118**		**886.880.127**		**975.011.622**		**630.509.056**		**627.844.338**	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan sesuai ketentuan**	**100,00%**	**100,00%**	**389.869.118**	**100,00%**	**886.880.127**	**100,00%**	**975.011.622**	**100,00%**	**630.509.056**	**100,00%**	**627.844.338**	
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				278.159.000		297.067.000		298.065.000		200.785.000		201.285.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	47 Unit	46 Unit	278.159.000	46 Unit	297.067.000	46 Unit	298.065.000	46 Unit	200.785.000	46 Unit	201.285.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.586.000		269.965.000		260.900.000		155.745.118		268.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	N/A	31 Unit	37.586.000	35 Unit	269.965.000	37 Unit	260.900.000	40 Unit	155.745.118	42 Unit	268.500.000	Kecamatan Semarang Selatan
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.124.118		319.848.127		416.046.622		273.978.938		158.059.338	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	11 Unit	74.124.118	11 Unit	319.848.127	11 Unit	416.046.622	11 Unit	273.978.938	11 Unit	158.059.338	Kecamatan Semarang Selatan
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**3.605.282.380**		**3.986.705.483**		**4.152.718.572**		**4.183.212.817**		**4.255.142.426**	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu**	**100,00%**	**100,00%**	**3.605.282.380**	**100,00%**	**3.986.705.483**	**100,00%**	**4.152.718.572**	**100,00%**	**4.183.212.817**	**100,00%**	**4.255.142.426**	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**588.473.380**		**597.955.483**		**692.468.572**		**708.462.817**		**711.892.426**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait**	**100,00%**	**100,00%**	**588.473.380**	**100,00%**	**597.955.483**	**100,00%**	**692.468.572**	**100,00%**	**708.462.817**	**100,00%**	**711.892.426**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8.200.000		8.700.000		8.800.000		8.900.000		9.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	N/A	1 Laporan	8.200.000	1 Laporan	8.700.000	1 Laporan	8.800.000	1 Laporan	8.900.000	1 Laporan	9.000.000	Kecamatan Semarang Selatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100,00%**	**100,00%**	**580.273.380**	**100,00%**	**589.255.483**	**100,00%**	**683.668.572**	**100,00%**	**699.562.817**	**100,00%**	**702.892.426**	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				580.273.380		589.255.483		683.668.572		699.562.817		702.892.426	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen	3 Dokumen	580.273.380	3 Dokumen	589.255.483	3 Dokumen	683.668.572	3 Dokumen	699.562.817	3 Dokumen	702.892.426	Kecamatan Semarang Selatan
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				**526.809.000**		**626.750.000**		**626.750.000**		**626.750.000**		**626.750.000**	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Selatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Selatan**	**100,00%**	**100,00%**	**526.809.000**	**100,00%**	**626.750.000**	**100,00%**	**626.750.000**	**100,00%**	**626.750.000**	**100,00%**	**626.750.000**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				526.809.000		626.750.000		626.750.000		626.750.000		626.750.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	526.809.000	12 Laporan	626.750.000	12 Laporan	626.750.000	12 Laporan	626.750.000	12 Laporan	626.750.000	Kecamatan Semarang Selatan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Tengah	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000		99.000.000		99.250.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Lamper Tengah
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Lor	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000		99.000.000		99.250.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Lamper Lor
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Kidul	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000		99.000.000		99.250.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Lamper Kidul
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Peterongan	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000		99.000.000		99.250.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Peterongan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonodri	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000	12 Laporan	99.000.000		99.250.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Wonodri
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pleburan	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000		99.000.000		99.250.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Pleburan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mugassari	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000		99.000.000	12 Laporan	99.250.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Mugassari
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Randusari	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000		99.000.000	12 Laporan	99.250.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Randusari
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Barusari	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000		99.000.000	12 Laporan	99.250.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Barusari
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bulustalan	100,00%	100,00%	98.000.000	100,00%	98.500.000	100,00%	98.750.000	100,00%	99.000.000	100,00%	99.250.000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.000.000		98.500.000		98.750.000		99.000.000	12 Laporan	99.250.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	98.500.000	12 Laporan	98.750.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.250.000	Kelurahan Bulustalan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**1.510.000.000**		**1.777.000.000**		**1.846.000.000**		**1.858.000.000**		**1.924.000.000**	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100,00%**	**100,00%**	**1.510.000.000**	**100,00%**	**1.777.000.000**	**100,00%**	**1.846.000.000**	**100,00%**	**1.858.000.000**	**100,00%**	**1.924.000.000**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.185.000.000		1.292.000.000		1.321.000.000		1.325.500.000		1.378.500.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1.185.000.000	12 Laporan	1.292.000.000	12 Laporan	1.321.000.000	12 Laporan	1.325.500.000	12 Laporan	1.378.500.000	Kecamatan Semarang Selatan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Tengah	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Lamper Tengah
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Lor	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Lamper Lor
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Kidul	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Lamper Kidul
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Peterongan	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Peterongan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonodri	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Wonodri
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pleburan	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Pleburan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mugassari	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Mugassari
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Randusari	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Randusari

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Barusari	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Barusari
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulustalan	100,00%	100,00%	32.500.000	100,00%	48.500.000	100,00%	52.500.000	100,00%	53.250.000	100,00%	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				32.500.000		48.500.000		52.500.000		53.250.000		54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	48.500.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.250.000	12 Laporan	54.550.000	Kelurahan Bulustalan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**107.929.996**		**119.348.518**		**124.318.390**		**125.231.285**		**127.384.615**	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan**	**100,00%**	**100,00%**	**107.929.996**	**100,00%**	**119.348.518**	**100,00%**	**124.318.390**	**100,00%**	**125.231.285**	**100,00%**	**127.384.615**	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**107.929.996**		**119.348.518**		**124.318.390**		**125.231.285**		**127.384.615**	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**107.929.996**	**12 Kegiatan**	**119.348.518**	**12 Kegiatan**	**124.318.390**	**12 Kegiatan**	**125.231.285**	**12 Kegiatan**	**127.384.615**	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				107.929.996		119.348.518		124.318.390		125.231.285		127.384.615	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	12 Laporan	107.929.996	12 Laporan	119.348.518	12 Laporan	124.318.390	12 Laporan	125.231.285	12 Laporan	127.384.615	Kecamatan Semarang Selatan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**30.832.006**		**34.093.897**		**35.513.624**		**35.774.407**	**82,00%**	**36.389.542**	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan**	**80,00%**	**82,00%**	**30.832.006**	**82,00%**	**34.093.897**	**82,00%**	**35.513.624**	**82,00%**	**35.774.407**	**82,00%**	**36.389.542**	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**30.832.006**		**34.093.897**		**35.513.624**		**35.774.407**		**36.389.542**	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**30.832.006**	**2 Kegiatan**	**34.093.897**	**2 Kegiatan**	**35.513.624**	**2 Kegiatan**	**35.774.407**	**2 Kegiatan**	**36.389.542**	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30.832.006		34.093.897		35.513.624		35.774.407		36.389.542	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	100 Orang	100 Orang	30.832.006	100 Orang	34.093.897	100 Orang	35.513.624	100 Orang	35.774.407	100 Orang	36.389.542	Kecamatan Semarang Selatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**25.025.398.351**		**26.162.997.373**		**26.658.133.419**		**26.749.082.875**		**26.963.613.807**	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan**	**100,00%**	**100,00%**	**25.025.398.351**	**100,00%**	**26.162.997.373**	**100,00%**	**26.658.133.419**	**100,00%**	**26.749.082.875**	**100,00%**	**26.963.613.807**	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**914.660.851**		**1.291.249.873**		**1.305.355.919**		**1.315.285.375**		**1.318.856.307**	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	**Jumlah laporan hasil musrenbang**	**15 Laporan**	**11 Laporan**	**914.660.851**	**11 Laporan**	**1.291.249.873**	**11 Laporan**	**1.305.355.919**	**11 Laporan**	**1.315.285.375**	**11 Laporan**	**1.318.856.307**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				183.160.851		140.129.873		144.235.919		144.165.375		142.736.307	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakata n	183.160.851	6 Lembaga Kemasyarakatan	140.129.873	6 Lembaga Kemasyarakatan	144.235.919	6 Lembaga Kemasyarakatan	144.165.375	6 Lembaga Kemasyarakatan	142.736.307	Kecamatan Semarang Selatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**225.000.000**	**12 Kegiatan**	**370.000.000**	**12 Kegiatan**	**380.000.000**	**12 Kegiatan**	**390.000.000**	**12 Kegiatan**	**395.000.000**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				225.000.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000		395.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	225.000.000	6 Pokmas/Ormas	370.000.000	6 Pokmas/ Ormas	380.000.000	6 Pokmas/ Ormas	390.000.000	6 Pokmas/ Ormas	395.000.000	Kecamatan Semarang Selatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Tengah	3 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000	12 Kegiatan	104.600.000	12 Kegiatan	104.600.000	12 Kegiatan	104.600.000	12 Kegiatan	104.600.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Tengah)				50.000.000		104.600.000		104.600.000		104.600.000		104.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Tengah (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	104.600.000	6 Pokmas/ Ormas	104.600.000	6 Pokmas/ Ormas	104.600.000	6 Pokmas/ Ormas	104.600.000	Kelurahan Lamper Tengah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Lor	3 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000	12 Kegiatan	87.800.000	12 Kegiatan	87.800.000	12 Kegiatan	87.800.000	12 Kegiatan	87.800.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		87.800.000		87.800.000		87.800.000		87.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	87.800.000	6 Pokmas/ Ormas	87.800.000	6 Pokmas/ Ormas	87.800.000	6 Pokmas/ Ormas	87.800.000	Kelurahan Lamper Lor

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Kidul	3 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000	12 Kegiatan	66.800.000	12 Kegiatan	66.800.000	12 Kegiatan	66.800.000	12 Kegiatan	66.800.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	66.800.000	6 Pokmas/ Ormas	66.800.000	6 Pokmas/ Ormas	66.800.000	6 Pokmas/ Ormas	66.800.000	Kelurahan Lamper Kidul
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Peterongan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peterongan	3 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000	12 Kegiatan	96.200.000	12 Kegiatan	96.200.000	12 Kegiatan	96.200.000	12 Kegiatan	96.200.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peterongan	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	96.200.000	6 Pokmas/ Ormas	96.200.000	6 Pokmas/ Ormas	96.200.000	6 Pokmas/ Ormas	96.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	96.200.000	6 Pokmas/ Ormas	96.200.000	6 Pokmas/ Ormas	96.200.000	6 Pokmas/ Ormas	96.200.000	Kelurahan Peterongan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Wonodri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonodri	3 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000	12 Kegiatan	88.000.000	12 Kegiatan	88.000.000	12 Kegiatan	88.000.000	12 Kegiatan	88.000.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonodri	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	88.000.000	6 Pokmas/ Ormas	88.000.000	6 Pokmas/ Ormas	88.000.000	6 Pokmas/ Ormas	88.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	88.000.000	6 Pokmas/ Ormas	88.000.000	6 Pokmas/ Ormas	88.000.000	6 Pokmas/ Ormas	88.000.000	Kelurahan Wonodri
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Pleburan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pleburan	3 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000	12 Kegiatan	79.400.000	12 Kegiatan	79.400.000	12 Kegiatan	79.400.000	12 Kegiatan	79.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		79.400.000		79.400.000		79.400.000		79.400.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	79.400.000	6 Pokmas/ Ormas	79.400.000	6 Pokmas/ Ormas	79.400.000	6 Pokmas/ Ormas	79.400.000	Kelurahan Pleburan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Mugassari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mugassari	3 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000	12 Kegiatan	66.800.000	12 Kegiatan	66.800.000	12 Kegiatan	66.800.000	12 Kegiatan	66.800.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat d(Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	66.800.000	6 Pokmas/ Ormas	66.800.000	6 Pokmas/ Ormas	66.800.000	6 Pokmas/ Ormas	66.800.000	Kelurahan Mugassari
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Randusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Randusari	3 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000	12 Kegiatan	75.600.000	12 Kegiatan	75.600.000	12 Kegiatan	75.600.000	12 Kegiatan	75.600.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		75.600.000		75.600.000		75.600.000		75.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	75.600.000	6 Pokmas/ Ormas	75.600.000	6 Pokmas/ Ormas	75.600.000	6 Pokmas/ Ormas	75.600.000	Kelurahan Randusari
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Barusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Barusari	3 Kegiatan	12 Kegiatan	56.500.000	12 Kegiatan	57.960.000	12 Kegiatan	57.960.000	12 Kegiatan	57.960.000	12 Kegiatan	57.960.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				56.500.000		57.960.000		57.960.000		57.960.000		57.960.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	75.600.000	6 Pokmas/ Ormas	75.600.000	6 Pokmas/ Ormas	75.600.000	6 Pokmas/ Ormas	75.600.000	Kelurahan Barusari
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Bulustalan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulustalan	3 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000	12 Kegiatan	57.960.000	12 Kegiatan	57.960.000	12 Kegiatan	57.960.000	12 Kegiatan	57.960.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		57.960.000		57.960.000		57.960.000		57.960.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas/Ormas)	10 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	6 Pokmas/Ormas	57.960.000	6 Pokmas/ Ormas	57.960.000	6 Pokmas/ Ormas	57.960.000	6 Pokmas/ Ormas	57.960.000	Kelurahan Bulustalan
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**24.110.737.500**		**24.871.747.500**		**25.352.777.500**		**25.433.797.500**		**25.644.757.500**	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya**	**6 Dokumen**	**4 Laporan**	**24.110.737.500**	**4 Laporan**	**24.871.747.500**	**4 Laporan**	**25.352.777.500**	**4 Laporan**	**25.433.797.500**	**4 Laporan**	**25.644.757.500**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	4 Lembaga	4 Lembaga	127.000.000	4 Lembaga	127.000.000	4 Lembaga	127.000.000	4 Lembaga	127.000.000	4 Lembaga	127.000.000	Kecamatan Semarang Selatan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Tengah	6 Dokumen	4 Laporan	2.557.200.000	4 Laporan	2.657.200.000	4 Laporan	2.707.200.000	4 Laporan	2.707.200.000	4 Laporan	2.707.200.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.557.200.000		2.657.200.000		2.707.200.000		2.707.200.000		2.707.200.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga	6 Lembaga	2.557.200.000	6 Lembaga	2.657.200.000	6 Lembaga	2.707.200.000	6 Lembaga	2.707.200.000	6 Lembaga	2.707.200.000	Kelurahan Lamper Tengah
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Lor	6 Dokumen	4 Laporan	1.880.000.000	4 Laporan	1.980.000.000	4 Laporan	2.080.000.000	4 Laporan	2.080.000.000	4 Laporan	2.080.000.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.880.000.000		1.980.000.000		2.080.000.000		2.080.000.000		2.080.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga	6 Lembaga	1.880.000.000	6 Lembaga	1.980.000.000	6 Lembaga	2.080.000.000	6 Lembaga	2.080.000.000	6 Lembaga	2.080.000.000	Kelurahan Lamper Lor
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Kidul	6 Dokumen	4 Laporan	1.929.800.000	4 Laporan	2.029.800.000	4 Laporan	2.079.800.000	4 Laporan	2.079.800.000	4 Laporan	2.079.800.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.929.800.000		2.029.800.000		2.079.800.000		2.079.800.000		2.079.800.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga	6 Lembaga	1.929.800.000	6 Lembaga	2.029.800.000	6 Lembaga	2.079.800.000	6 Lembaga	2.079.800.000	6 Lembaga	2.079.800.000	Kelurahan Lamper Kidul
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Peterongan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Peterongan	6 Dokumen	4 Laporan	2.485.400.000	4 Laporan	2.535.400.000	4 Laporan	2.585.400.000	4 Laporan	2.585.400.000	4 Laporan	2.585.400.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.485.400.000		2.535.400.000		2.585.400.000		2.585.400.000		2.585.400.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Peterongan	5 Lembaga	6 Lembaga	2.485.400.000	6 Lembaga	2.535.400.000	6 Lembaga	2.585.400.000	6 Lembaga	2.585.400.000	6 Lembaga	2.585.400.000	Kelurahan Peterongan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonodri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonodri	6 Dokumen	4 Laporan	3.894.000.000	4 Laporan	3.994.000.000	4 Laporan	4.094.000.000	4 Laporan	4.094.000.000	4 Laporan	4.094.000.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.894.000.000		3.994.000.000		4.094.000.000		4.094.000.000		4.094.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga	6 Lembaga	3.894.000.000	6 Lembaga	3.994.000.000	6 Lembaga	4.094.000.000	6 Lembaga	4.094.000.000	6 Lembaga	4.094.000.000	Kelurahan Wonodri
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pleburan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pleburan	6 Dokumen	4 Laporan	2.282.600.000	4 Laporan	2.382.600.000	4 Laporan	2.512.600.000	4 Laporan	2.512.600.000	4 Laporan	2.512.600.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.282.600.000		2.382.600.000		2.512.600.000		2.512.600.000		2.512.600.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga	6 Lembaga	2.282.600.000	6 Lembaga	2.382.600.000	6 Lembaga	2.512.600.000	6 Lembaga	2.512.600.000	6 Lembaga	2.512.600.000	Kelurahan Pleburan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mugassari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mugassari	6 Dokumen	4 Laporan	2.669.800.000	4 Laporan	2.769.800.000	4 Laporan	2.769.800.000	4 Laporan	2.769.800.000	4 Laporan	2.769.800.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.669.800.000		2.769.800.000		2.769.800.000		2.769.800.000		2.769.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga	6 Lembaga	2.669.800.000	6 Lembaga	2.769.800.000	6 Lembaga	2.769.800.000	6 Lembaga	2.769.800.000	6 Lembaga	2.769.800.000	Kelurahan Mugassari

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Randusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Randusari	6 Dokumen	4 Laporan	2.426.200.000	4 Laporan	2.526.200.000	4 Laporan	2.526.200.000	4 Laporan	2.606.200.000	4 Laporan	2.606.200.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.426.200.000		2.526.200.000		2.526.200.000		2.606.200.000		2.606.200.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga	6 Lembaga	2.426.200.000	6 Lembaga	2.526.200.000	6 Lembaga	2.526.200.000	6 Lembaga	2.606.200.000	6 Lembaga	2.606.200.000	Kelurahan Randusari
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Barusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Barusari	6 Dokumen	4 Laporan	2.160.800.000	4 Laporan	2.160.800.000	4 Laporan	2.160.800.000	4 Laporan	2.160.800.000	4 Laporan	2.160.800.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.160.800.000		2.160.800.000		2.160.800.000		2.160.800.000		2.160.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga	6 Lembaga	2.160.800.000	6 Lembaga	2.160.800.000	6 Lembaga	2.160.800.000	6 Lembaga	2.160.800.000	6 Lembaga	2.160.800.000	Kelurahan Barusari
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bulustalan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bulustalan	6 Dokumen	4 Laporan	1.564.800.000	4 Laporan	1.564.800.000	4 Laporan	1.564.800.000	4 Laporan	1.564.800.000	4 Laporan	1.564.800.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.564.800.000		1.564.800.000		1.564.800.000		1.564.800.000		1.564.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga	6 Lembaga	1.564.800.000	6 Lembaga	1.564.800.000	6 Lembaga	1.564.800.000	6 Lembaga	1.564.800.000	6 Lembaga	1.564.800.000	Kelurahan Bulustalan
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	**Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan**	**100,00%**	**100,00%**	**8.137.500**	**100,00%**	**8.147.500**	**100,00%**	**8.177.500**	**100,00%**	**8.197.500**	**100,00%**	**8.157.500**	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				8.137.500		8.147.500		8.177.500		8.197.500		8.157.500	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.137.500	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.147.500	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.177.500	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.197.500	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.157.500	Kecamatan Semarang Selatan
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	**Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	**100,00%**	**100,00%**	**125.000.000**	**100,00%**	**136.000.000**	**100,00%**	**137.000.000**	**100,00%**	**138.000.000**	**100,00%**	**139.000.000**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				125.000.000		136.000.000		137.000.000	12 Laporan	138.000.000		139.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2 Laporan	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	136.000.000	12 Laporan	137.000.000	12 Laporan	138.000.000	12 Laporan	139.000.000	Kecamatan Semarang Selatan

Sumber: Kecamatan Semarang Selatan 2025

VII.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Semarang Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semarang Selatan yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Selatan	Angka	95,00	96,70	96,73	96,76	96,79	96,82	
Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Selatan	Persen	89,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Selatan	Angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan	Angka	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan 2025

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	94,00	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Semarang Selatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan urusan kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Semarang Selatan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Semarang Selatan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Semarang Selatan.

Permasalahan yang dihadapi sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Semarang Selatan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Semarang Selatan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Semarang Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

37. KECAMATAN SEMARANG UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Sebagai pedoman perencanaan, Renstra ini disusun dengan memedomani Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, sehingga dokumen ini selaras dengan visi pembangunan nasional maupun daerah.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang maka Kecamatan Semarang Utara wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan

yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019/ No. 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;

2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya unsur kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Berisi latar belakang, landasan hokum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang
Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Utara, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Utara. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan
Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Semarang Utara yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Semarang Utara yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutupan
Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Semarang Utara mempunyai luas 1.135,275 ha yang mencakup 9 (sembilan) Kelurahan, Adapun sembilan kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Bandarharjo dengan luas 342.675 ha; Kelurahan Bulu Lor dengan luas 68.676 ha; Kelurahan Plombokan dengan luas 34.900 ha; Kelurahan Purwosari dengan luas 48.049 ha; Kelurahan Panggung Kidul dengan luas 68.963 ha; Kelurahan Panggung Lor dengan luas 123.470 ha; Kelurahan Kuningan dengan luas 41.54101 ha; Kelurahan Tanjung Mas dengan luas 323.782 ha; Kelurahan Dadapsari dengan luas 83.250 ha; Dengan Batas wilayah Kecamatan Semarang Utara meliputi :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kecamatan Semarang Timur
Sebelah Selatan	: Kecamatan Semarang Tengah
Sebelah Barat	: Kecamatan Semarang Barat

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Jumlah penduduk Kecamatan Semarang Utara seluruhnya 118.300 jiwa,dengan jumlah penduduk laki-laki 58.435 jiwa,perempuan 67.027 jiwa dengan jumlah penduduk yang memiliki KK 41.454 jiwa dan memiliki KTP sebesar 90.281 jiwa dan jumlah RW sebanyak 90 dan jumlah RT sebanyak 711.Jumlah penduduk sesuai dengan KK yakni 41.454 orang dengan warga yang berKTP 90.281 jiwa.

Sedangkan komposisi populasi penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1 Agama Kecamatan Semarang Utara

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	54.496 jiwa
2.	Kristen	9.473 jiwa
3.	Katholik	15.221 jiwa
4.	Hindu	19 jiwa
5.	Budha	9.524 jiwa
6.	Konghuchu	13 jiwa
7.	Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa	21 jiwa

Sumber : GIS Dukcapil Kemendagri Tahun 2024

Topografi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang berada pada Lereng 1 yaitu dengan kelerengan sebesar 0-2 % atau lereng yang datar. Sedangkan Secara Hirologi dan Hidrogeologi Kecamatan Utara terdapat 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1.	DAS Bajak	111,60
2.	DAS Garang	326,21
3.	DAS Kanal Timur	752,34

Sumber : Diolah dari data RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031

Sedangkan apabila dilihat secara daerah/kewilayahan yaitu Jumlah RW dan RT disetiap kelurahan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah RW dan RT di setiap Kelurahan

No.	Kelurahan	Luas Wilayah	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1.	Bulu Lor	60.00 Ha	11	79
2.	Plombokan	60.00 Ha	6	49
3.	Panggung Kidul	33.93 Ha	4	29
4.	Panggung Lor	140.00 Ha	14	124
5.	Kuningan	41.52 Ha	11	88
6.	Purwosari	48.00 Ha	6	46
7.	Dadapsari	46.89 Ha	10	60
8.	Bandarharjo	342.68 Ha	12	102
9.	Tanjung Mas	323.78 Ha	16	130

Sumber : GIS Dukcapil Kemendagri Tahun 2024

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Semarang Utara bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; dimana disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Semarang Utara menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
i. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
k. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
m. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
n. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Semrang Utara telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi

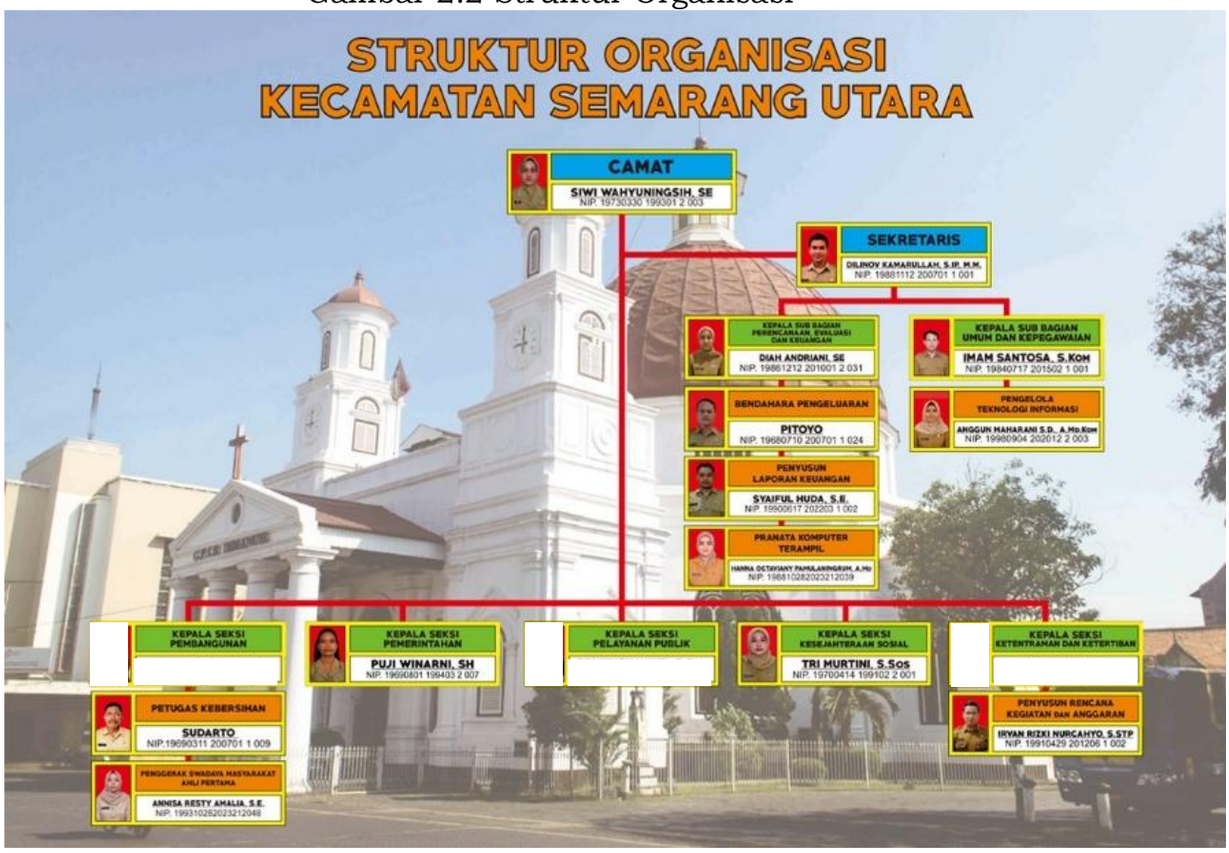

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Kecamatan Semarang Utara

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dengan demikian Tugas Camat adalah :

- koordinasi dan pengendalian
- Pelayanan Publik
- Pemberdayaan Masyarakat

Selain itu tugas camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,tugas tersebut yaitu

- Penegakan Peraturan
- Penanganan Darurat

Peraturan wali kota semarang Nomor 47 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi kecamatan menyatakan bahwa : Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.Tugas tersebut meliputi :

a. perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;

b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
e. penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
f. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
g. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
h. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
j. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
k. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
l. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasiPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
m. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
n. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
o. penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
p. penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
q. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
r. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
s. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Camat :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain :

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
d. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
e. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
h. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
  a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
  b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
  d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:
  a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
  c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
  a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan

b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
  a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, antara lain:
  a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  b. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan,antara lain:
  a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
  b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
  c. evaluasi Kelurahan;
- Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
  a. pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
  b. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
  c. peningkatan ketahanan pangan keluarga;
  d. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
  e. peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
  f. peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
  g. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
  h. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
  i. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
  j. pelatihan keluarga tanggap bencana alam;

k. pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
l. penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;

- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
  a. pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
  b. penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
  c. binaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
  d. Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan;
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan, antara lain:
  a. penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
  b. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
  c. penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
  d. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
  e. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
  a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan; dan
  d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.
  a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
     - Pelaksanaan urusan Pemerintahan pelayanan yang terkait dengan perizinan non usaha.
     - pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan.
     - pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
  b. Lembaga kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
  c. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; dan
  d. Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas Sekretaris Kecamatan : Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan,Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

a. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. pengkoordinasian,sinkronisasi,pembinaan,pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
d. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
g. pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
h. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan.
i. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
j. pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
m. pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
n. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
o. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan dilingkungan Kecamatan;

p. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan /pengawasan;
q. pelaksanaan kegiatan pengadaan,pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
r. pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
s. pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan.
t. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan.
u. pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;
v. pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
w. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
x. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
y. pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang- undangan di lingkungan Kecamatan;
z. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan.
å. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
ä. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi kecamatan.
ö. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan dan
aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
- Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan.
   - Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
   - Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

4. Seksi Pembangunan
   - Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
   - Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
   - Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
   - Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

6. Seksi Pelayanan Publik
   - Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
   - Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   - Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
   - Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

8. Kelurahan

   Kedudukan dan Susunan Organisasi
   - Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.
   - Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

   Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
   a. Lurah;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Pembangunan;
   d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
   e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
   f. Jabatan Fungsional.

   - Tugas dan Fungsi Lurah :

     Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana mempunyai tugas:
     a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
     b. pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
     c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
     d. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
     e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
     f. pelaksanaan pelayanan masyarakat;

g. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
i. pelaksanaan kegiatan koordinasi;pelaksanaan kegiatan sekretariat;
j. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
k. pelaksanaan kegiatan pembangunan;
l. pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
m. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum.
n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
s. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- Sekretariat Kelurahan :
  a. Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
  b. Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

- Seksi Pembangunan
  a. Seksi Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Lurah.
  b. Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
  a. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
  b. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala Seksi.
- Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  a. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah daan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
  b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

9. Jabatan Fungsional
   Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
   a. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   b. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
   c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Semarang Utara

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada 1 Juli 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 81 pegawai, dengan jumlah 42 pegawai laki – laki (51,86%) dan 39 pegawai perempuan (48,14%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebanyak 35 pegawai, yang terdiri dari 27 pegawai laki-laki (77,14%) dan 8 pegawai perempuan (22,86%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah sebanyak 116 pegawai.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian antara Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025

NO	Instansi	ASN		Non ASN	
		L	P	L	P
1	Kecamatan	15	21	23	1
2	Bandarharjo	4	-	1	1
3	Bulu Lor	5	1	-	1
4	Dadapsari	3	2	1	-
5	Kuningan	3	3	-	-
6	Panggung Kidul	1	2	-	2
7	Panggung Lor	4	3	-	-
8	Plombokan	2	2	-	2
9	Purwosari	2	3	1	-
10	Tanjung Mas	-	5	1	1
	Total	**39**	**42**	**27**	**8**

Sumber Kecamatan Semarang Utara Agustus Tahun 2025

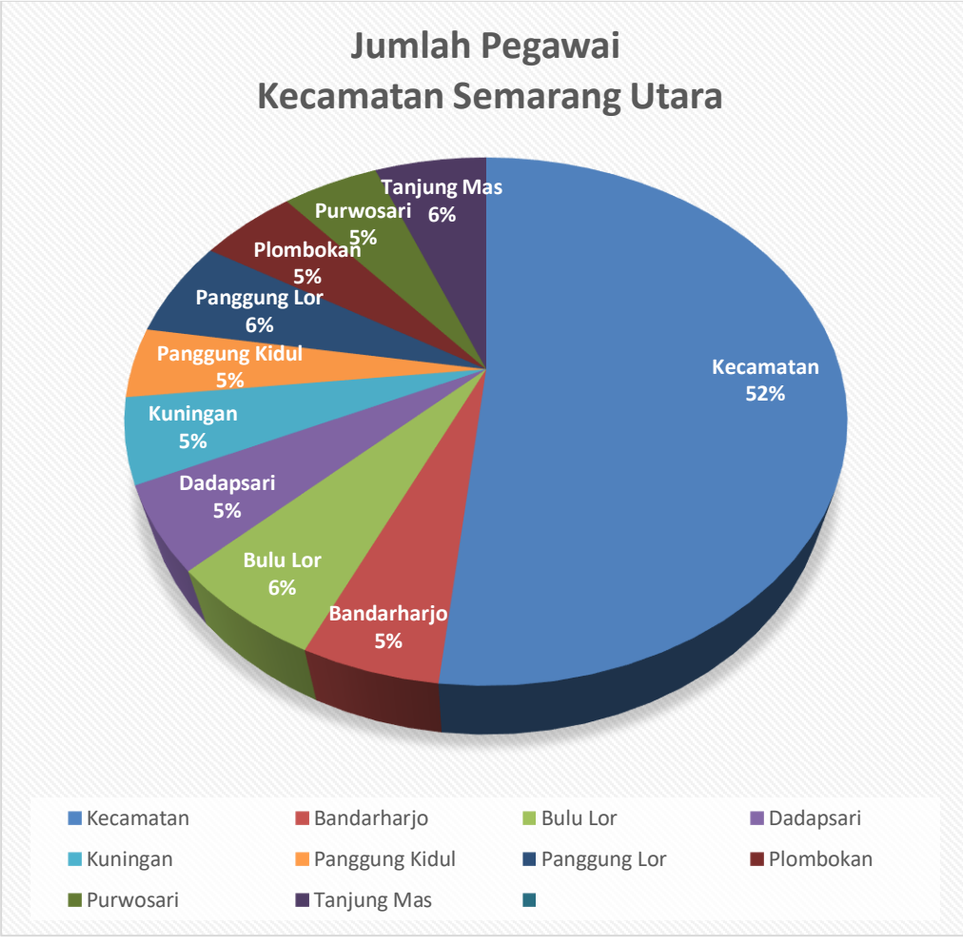

Sumber Kecamatan Semarang Utara Tahun Juli 2025

- PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi Pegawai ASN menurut jabatan terdiri dari eselon IV a yaitu Camat, Eselon III B yaitu Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa yaitu lurah dan Kasi di Kecamatan, Eselon IVb yaitu Kasubag di Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kasi di Kelurahan. Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 1 pegawai (1,23%), golongan III sebanyak 44 pegawai (54,32%), golongan II sebanyak 1 pegawai (1,23%), golongan IX sebanyak 13 pegawai (16,05%) golongan VII sebanyak 8 pegawai (9,87%) dan golongan V sebanyak 3 pegawai (3,7%)dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.Komposisi Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah ASN berdasarkan Pangkat/ Golongan
di Kecamatan Semarang Utara

Pangkat / Golongan Ruang	L	P	Jumlah	Persentase terhadap ASN (%)
Pembina (IV/a)	-	1	1	1,23
Penata Tingkat I (III/d)	8	9	16	19,75
Penata (III/c)	12	7	19	23,46
Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	-	5	6,17
Penata Muda (III/a)	4	-	4	4,94
Pengatur Tingkat I (II/d)	5	5	10	12,35
Pengatur (II/c)	-	-	-	-

Pangkat / Golongan Ruang	L	P	Jumlah	Persentase terhadap ASN (%)
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)	1	-	1	1,23
Juru Tk I (Id)	-	-	-	-
PPPK (IX)	6	7	13	16,05
PPPK(VII)	2	6	8	9,88
PPPK (V)	1	2	3	3,70
Total	**44**	**37**	**81**	

Sumber Kecamatan Semarang Utara Agustus Tahun 2025

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari pegawai ASN Berdasarkan tingkat pendidikan menunjukan bahwa sebagian besar pegawai telah berpendidikan S1 /D-4 sedangkan pada urutan kedua pedidikannya D-3, sedangkan pada urutan berikutnya berpendidikan S2, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal pegawai telah cukup baik. Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Kecamatan Semarang Utara didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 dan S1 sebanyak 52 orang (64,2 %), D4 dan D3 sebanyak 22 orang (27,16%), dan lulusan SMA sebanyak 6 orang (7,4%), dan lulusan SD sebanyak 1 orang (1,24%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN 34 Orang (97,14%) lulusan SMA, 1 Orang (2,86%) lulusan D3.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kecamatan Semarang Utara

No	Unit Kerja	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD
1	Kecamatan	3	18	1	10	28	-	-
2	Bandarharjo	-	3	-	1	2	-	-
3	Bulu Lor	1	3	-	1	1	-	1
4	Dadapsari	1	3	-	1	1	-	-
5	Kuningan	1	3	-	2	-	-	-
6	Panggung Kidul	-	1	-	2	2	-	-
7	Panggung Lor	-	5	-	2	-	-	-
8	Plombokan	-	4	-	-	2	-	-
9	Purwosari	-	3	-	1	2	-	-
10	Tanjung Mas	1	2	-	2	2	-	-
	Total	**7**	**45**	**1**	**22**	**41**	**-**	**1**

- Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN Kelurahan pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kecamatan Semarang Utara

No	Unit Kerja	III	IV	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	JUMLAH
1	Kecamatan	2	5	-	29	36
2	Bandarharjo	-	3	-	1	4
3	Bulu Lor	-	4	-	2	6
4	Dadapsari	-	4	-	1	5
5	Kuningan	-	5	-	1	6
6	Panggung Kidul	-	2	-	1	3
7	Panggung Lor	-	4	-	3	7
8	Plombokan	-	4	-	-	4
9	Purwosari	-	4	-	1	5
10	Tanjung Mas	-	4	-	1	5
	Total	**2**	**39**	**-**	**40**	**81**

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Semarang Utara berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Peralatan Yang Mendukung Pelayanan di Kecamatan Semarang Utara

NO.	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil)	3	Baik	1 Mobil Dinas Camat 1 Mobil Dinas Sekcam 1 Mobil Patroli
2	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2	Rusak Ringan	
3	Kendaraan Dinas Roda Tiga	6	5 Rusak Ringan	Kendaraan tim kebersihan
			1 Baik	kendaran pemadam kebakaran
4	AC	17	11 Baik 6 Rusak ringan	
5	Komputer	12	10 Baik 2 Rusak ringan	
6	Laptop	13	9 Baik 4 Rusak Ringan	
7	Printer	16	12 Baik 4 Rusak Ringan	
8	Scanner	3	Baik	
9	Kursi Rapat	150	Baik	
10	Sound system	1	Baik	
11	LCD projector	3	Baik	
12	Layar Projector	2	Baik	
13	Sofa Tamu	2	Baik	
14	Mesin Pemotong Rumput	5	Baik	

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, per Desember 2024

Tabel 2.9
Aset Tanah di Kecamatan Semarang Utara

o.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Ket.
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Kaveling (dst)	52	2012	Jl. Tambra Kel. Kuningan	Hak Pakai	08/06/2007		Kantor Sekretariat Karang Taruna	Pembelian	14.000	
2	Tanah Kaveling (dst)	287	1993	JL. CEMARA NO.9	Hak Pakai	08/06/2007	HP 23	RUMAH DINAS LURAH PURWOSARI	Pembelian	158.015	
3	Tanah Kaveling (dst)	95	2010	JL. PERNAKAN RT.02 RW.08, KEL. DADAPSARI	Hak Pakai			RUMAH DINAS LURAH	Pembelian	19.100	
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	642	2012	Jl, Kebonharjo Raya Rt.01 Rw. II Kel. Tanjung Mas	Hak Pakai	30/04/2007	HP 5	Kantor & Rumdis Kebersihan	Pembelian	260.000	
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	234	1980	JL. BROTOJOYO V / 4	Hak Pakai	30/04/2007	HP 2	KANTOR & BALAI KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Pembelian	81.000	
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	1987	JL. BROTOJOYO NO.7	Hak Pakai			KANTOR, BALAI, RUMAH DINAS KELURAHAN PLOMBOKAN	Pembelian	851.250	
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	638	1989	JL. BANDARHARJO TIMUR No. 17, KEL. BANDARHARJO	Hak Pakai	08/04/2008	HP 34	KANTOR & BALAI KELURAHAN	Pembelian	103.700	
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	385	1993	JL. PATRIOT II / H 231	Hak Pakai	26/07/2007	HP 24	KANTOR & BALAI KELURAHAN PURWOSARI	Pembelian	213.679	
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.086	1994	Jl. Taman Brotojoyo No.2	Hak Pakai	26/07/2007	HP 5	Kantor Kecamatan Semarang Utara	Pembelian	569.250	
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300	1994	JL. SURTIKANTI RAYA 27B KEL. BULU LOR	Hak Pakai	05/06/2007	HP 16	RUMAH DINAS	Pembelian	153.000	
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	636	1994	JL.TAMBRA DALAM II NO.9	Hak Pakai	26/07/2007	HP 9	TANAH KANTOR KELURAHAN	Pembelian	394.400	
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	583	1994	JL. RONGGOWARSITO 42A	Hak Pakai	30/04/2007	HP 4	KANTOR DAN BALAI	Pembelian	119.000	
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	757	2010	JL. SURTIKANTI RAYA 27B KEL. BULU LOR	Hak Pakai	22/11/2005		RUMAH DINAS	Pembelian	432.500	
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.685	2010	JL. KUALA MAS RAYA NO.41	Hak Pakai	30/04/2007	HP 4	KANTOR KELURAHAN PANGGUNG LOR	Pembelian	369.700	

o.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Ket.
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	226	2010	JL. KAKAP NO.72, KEL. DADAPSARI	Hak Pakai	17/11/2005	HP 4	KANTOR/ BALAI KELURAHAN/ PKK	Pembelian	73.000	
16	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	210	2010	JL. LODAN RAYA NO.3 RT 08 RW 03 KEL. BANDARHARJO	Hak Pakai			GEDUNG PERTEMUAN	Pembelian	56.100	
17	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	297	1999	JL. BROTOJOYO II	Hak Pakai	08/04/2008	HP 7	GEDUNG BALAI PERTEMUAN KEL. PANGGUNG KIDUL	Pembelian	219.450	
18	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	195	2010	JL. LODAN RAYA RT 02 RW 05, KEL. BANDARHARJO	Hak Pakai			BALAI RW. V/MCK	Pembelian	52.100	
19	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	200	2010	JL. LUMBA-LUMBA RAYA, KEL. BANDARHARJO	Hak Pakai			LAPANGAN BULU TANGKIS	Pembelian	44.100	
20	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	255	2010	JL. BEDAS SELATAN RT.08 RW.06, KEL. DADAPSARI	Hak Pakai	08/06/2007	HP 13	RUMAH PINTAR	Pembelian	13.300	
21	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	540	2010	JL. LAYUR RAYA, KEL DADAPSARI	Hak Pakai		HP 14	POS JAGA , DLL	Pembelian	380.500	
22	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	66	1993	JL.DORANG RT 08 RW 03	Hak Pakai			EKS.KANTOR VETERAN	Pembelian	13.200	
23	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	690	2010	JL.TAMBRA DALAM UTARA	Hak Pakai			GEDUNG BKB & RUANG TK	Pembelian	169.300	
24	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	65	2010	JL.BADER RAYA KEL. BANDARHARJO	Hak Pakai			MCK	Pembelian	14.300	
25	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	104	2010	JL.HASANUDIN RW. 02 KEL, BANDARHARJO	Hak Pakai			RUMAH BABINSA	Pembelian	24.100	
26	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	271	2011	Jl. Erowati Selatan RW II Kel. Bulu Lor	Hak Pakai	20/10/2000		Lapangan Futsal	Pembelian	175.000	
27	Tanah Untuk Bangunan Masjid	309	2007	Jl. Anggraeni III, Kel. Bulu Lor	Hak Pakai	08/06/2007	HP 17	Untuk Masjid	Pembelian	186.000	

o.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Ket.
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
28	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.551	2011	JL. KALIBARU TIMUR RT 07 RW 09 KEL. BANDARHARJO	Hak Pakai	28/12/2007	HP 30	taman	Pembelian	516.000	
29	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	37.562	2015	Perumahan Tanah Mas	Hak Pakai			Jaringan Drainase	Pembelian	14.799.428	
30	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	245	2023	Jl Inspeksi RT.07 RW.04 Kel Dadapsari Kec Semarang Utara				Tanah untuk Sarana Peribadatan	Pembelian	131.565	
31	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	349.462	2015	Perumahan Tanah Mas	Hak Pakai			Jaringan Jalan	Pembelian	137.688.028	
32	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.573	2015	Jl. Kuala Mas Raya No. 41 Kel. Panggung Lor	Hak Pakai			Sarana Pemerintahan	Pembelian	619.762	
33	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	18.005	2015	Jl. Kuala Mas III Kel. Panggung Lor	Hak Pakai			Sarana Pendidikan	Pembelian	7.093.970	
34	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4.044	2015	Jl. Kokrosono Kel. Panggung Lor	Hak Pakai			Sarana Peribadatan	Pembelian	1.593.336	
35	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.721	2015	Jl. Sumber Mas Raya Kel. Panggung Kidul	Hak Pakai			Sarana Perniagaan Tradisional	Pembelian	678.074	
36	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	903	2015	Jl. Tambaj Mas Raya Kel. Panggung Lor	Hak Pakai			Sarana Rekreasi Olahraga	Pembelian	355.782	
37	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	10.556	2015	Jl. Kuala Mas Raya	Hak Pakai			Sarana Ruang Terbuka	Pembelian	4.159.064	
38	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	271	2011	Jl. Anggraini II, Kel. Bulu Lor	Hak Pakai	05/06/2007		Tanah Lapangan Bulutangkis	Pembelian	163.000	
39	Tanah Lapangan Sepak Bola	8.318	2010	Jl.Taman Sentiyaki Kel.Bulu Lor	Hak Pakai	23/03/2006	HP 12	Lapangan Sepak Bola	Pembelian	1.842.700	
40	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.556	2010	JL. TAMBRA DALAM II NO 9	Hak Pakai			LAPANGAN OLAH RAGA	Pembelian	234.300	

o.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Ket.
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
41	Tanah Lapangan Bola Volly	1.185	2011	Jl. Surtikanti Raya, Kel. Bulu Lor	Hak Pakai	05/06/2007		Tanah Lapangan Bola Volly	Pembelian	957.000	
42	Tanah Lapangan Bola Volly	1.365	2010	JL. TAMAN BROTOJOYO	Hak Pakai	26/07/2007	HP 6	SARANA PRASARANA OLAHRAGA	Pembelian	322.200	
43	Tanah Untuk Makam Umum	7.650	2010	JL. LEMURU RAYA	Hak Pakai			TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	Pembelian	768.400	
44	Tanah Untuk Makam Umum	4.339	2010	JL. BROTOJOYO II	Hak Pakai	26/07/2007		MAKAM SOPONYONO	Pembelian	687.800	
45	tanah kampung lainnya (dst)	187	2010	JL. HASANUDIN	Hak Pakai			TANAH KOSONG	Pembelian	173.100	
									TOTAL ASET TANAH	**177.942.553**	

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, per Desember 2024

Tabel 2.10
Gedung dan Bangunan di Kecamatan Semarang Utara

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	JL.SURTIKANTI RAYA NO.27B	Tanah Milik Pemda	Pembelian	214.020
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	396	Jl, Brotojoyo No. 7 Kel. Plombokan		Pembelian	1.905.014
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	418	Jl. Brotojoyo II No. 61 Semarang		Pembelian	1.679.399
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	49.5	Jl. Kakap No.27, Kuningan, Kel Dadapsari Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50176		Pembelian	196.574
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	137.75	jl. Tambra dalam II/9 kel. Kuningan	Tanah Milik Pemda	Pembelian	388.889
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	249.9	jl. Tambra dalam II/9 Kel. Kuningan	Tanah Milik Pemda	Pembelian	457.914
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	400	Jl. Taman Brotojoyo No.2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	586.221
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	52	Jl. Tambra Dalam XI Kel. Kuningan	Tanah Milik Pemda	Pembelian	86.144
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	30	Jl. Tmn Brotojoyo No 2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	9.980
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	78	Jl. taman brotojoyo nomor 2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	57.780
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	297	Jl. Kebonharjo RW III Kel. Tanjungmas Kota Semarang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	179.014
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	297	Jl. Tanggul Mas Timur RT 12 RW 09	Tanah Milik Pemda	Pembelian	173.545
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	36	Jl. Tanggul Mas Barat RT 12 RW 10		Pembelian	162.383
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	66	JL. Kayumas Selatan Kel. Kuningan	Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.000
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	35	Jl. Bedas Utara	Tanah Milik Pemda	Pembelian	178.930
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	200	Jl.Taman Brotojoyo No.2 Semarang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	26.225
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	70	JL.SURTIKANTI RAYA NO.27B	Tanah Milik Pemda	Pembelian	99.400
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kurang Baik	20	Jl. Tambra Dalam XI Rt 03 Rw.11 Kel. Kuningan	Tanah Milik Pemda	Pembelian	27.000

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
19	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	387	Jl. Tambra Dalam RT 07 / RW 09 Kel. Kuningan	Tanah Milik Pemda	Pembelian	178.478
20	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	1036	Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Kel. Panggung Kidul	Tanah Milik Pemda	Pembelian	7.258.652
21	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	348	Jl. Kakap No. 72 Dadapsari	Tanah Milik Pemda	Pembelian	778.633
22	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Kurang Baik	60	Jl. Lodan Raya RT 2 RW 5		Pembelian	34.500
23	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	5.25	Jl. Bandarharjo RT 08 / RW 06	Tanah Milik Pemda	Pembelian	159.163
24	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	72	Jl. Lodan Raya RT 08 RW 06	Tanah Milik Pemda	Pembelian	304.653
25	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Kurang Baik	36	Jl. Cumi-cumi Raya		Pembelian	33.200
26	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	600	Jl. Purwosari Perbalan Gang I	Tanah Milik Pemda	Pembelian	178.589
27	Bangunan Posyandu	Baik	48	Jl. Bandarharjo Selatan RW 11 RT 02 Kel. Bandarharjo		Pembelian	51.498
28	Bangunan Posyandu	Baik	64	Jl. Kebonharjo RW 05 RT 06 Kel. Tanjungmas		Pembelian	64.768
29	Bangunan Posyandu	Baik	45	Jl. Ronggowarsito RW 11 RT 01 Kel. Tanjungmas		Pembelian	104.612
30	Bangunan Posyandu	Baik	46	Jl. Kalibaru Timur RW 09 RT 05 Kel. Bandarharjo		Pembelian	53.106
31	Bangunan Posyandu	Baik	46	Kp. Gisik Sari RW 01 RT 06 Kel. Bandarharjo		Pembelian	81.367
32	Bangunan Posyandu	Baik	45	Jl. Tambak Mulyo RW 14 RT 04 Kel. Tanjungmas		Pembelian	106.678
33	Bangunan Posyandu	Baik	24	JL LODAN RAYA RT 05 RW 02 KEL. BANDAHRARJO		Pembelian	172.397
34	Bangunan Posyandu	Baik	30	JL HASANUDIN RW 12 KEL. BANDARHARJO		Pembelian	145.525
35	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	8.25	Jl. TAMAN BROTOJOYO NO 2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	42.188
36	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	64	JL BOOMLAMA RT 007 RW 001 KEL. KUNINGAN		Pembelian	59.016
37	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	24	Jl Selo mas Barat I		Pembelian	262.259
38	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	48	Jl. Bader Raya RW 08 RT 07 Kel. Bandarharjo		Pembelian	136.098
39	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	48	JL. UDOWO BARAT I RT 04 RW 09 KEL. BULU LOR		Pembelian	91.846
40	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	96	Jl. Tambak Lorok RT. 04 RW. XV Kel. Tanjungmas	Tanah Milik Pemda	Pembelian	358.262

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
41	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	40	Jl. Tambak Mulyo RW 12 RT 07 Kel. Tanjungmas		Pembelian	149.587
42	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	40	Kp.darat Mulyo Rt.02 Rw.10		Pembelian	110.998
43	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	96	Tambak Mulyo RT.03 RW15		Pembelian	123.376
44	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	80	Jl. Kebonharjo RW 02 RT 02 Kel. Tanjungmas		Pembelian	69.649
45	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	112	Jl. Tambak Rejo RW 16 RT 01 Kel. Tanjungmas		Pembelian	49.903
46	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	36	Jl. Cumi Cumi Raya		Pembelian	180.462
47	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	120	Jl.Lodan Raya		Pembelian	67.824
48	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	264	Jl. Taman Muara Mas RT 6 RW 3 Panggung Lor	Tanah Milik Pemda	Pembelian	190.290
49	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	80	Jl. TM. Tambak Mas RT 03 RW 04 Panggung Lor	Tanah Milik Pemda	Pembelian	74.910
50	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	120	Kelurahan Bandarharjo RW X	Tanah Milik Pemda	Pembelian	189.744
51	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	10.99	Jl.Tambra Dalam RT.03 RW.XI Kelurahan Kuningan		Pembelian	79.281
52	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	10.79	Jl.Tambra Dalam Rt.02 Rw.XI Kelurahan Kuningan		Pembelian	75.365
53	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	32	Jl. Erowati Baru IV		Pembelian	94.307
54	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	2.5	Jl. Purwosari Perbalan Gang C		Pembelian	104.051
55	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	30	Jl.Palgunadi selatan		Pembelian	85.995
56	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	55	Jl.Udowo Barat		Pembelian	57.473
57	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	26	Jl.Banowati Tengah III		Pembelian	87.472
58	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	6	Jl.Sumber Mas kel. panggung kidul Kota Semarang		Pembelian	92.809
59	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	2	Jl.Cumi Cumi Raya		Pembelian	88.865

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
60	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	750	Jl.Brotojoyo Barat IV		Pembelian	187.378
61	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	20	Jl.Lodan Raya Kel. Bandarharjo Kota Semarang		Pembelian	187.439
62	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	35	Jl.Udowo Barat		Pembelian	190.364
63	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	192	Jl.Panggung Mas Utara		Pembelian	189.000
64	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	90	Jl.Purwosari Perbalan gang I RT. 06 RW. 06		Pembelian	187.270
65	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	24	Jl. Cemara No 9 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Semarang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	187.494
66	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Baik	147	Jl. Mujair No.15 RT 02 RW 09 Dadapsari		Pembelian	150.714
67	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Baik	148	Jl. Satria Selatan RW 5 Kelurahan Plombokan	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	187.240
68	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Baik	27	Jl Sentiaki Raya Kel Bulu Lor	Tanah Milik Pemda	Pembelian	136.955
69	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	96	Jl Erowati Selatan	Tanah Milik Pemda	Pembelian	14.800
70	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	100	Jl. Komodor Laut Yos Sudarso Kel. Bandarharjo		Pembelian	154.549
71	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	157	Jl. Mujahir Rt 2 Kel. Dadapsari		Pembelian	116.850
72	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	1306	Jl. Lodan Raya Kel. Bandarharjo		Pembelian	1.448.901
73	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	578.75	Jl.Surtikanti Raya	Tanah Milik Pemda	Pembelian	876.597
74	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	170	JL KALIBARU TIMUR RT 01 RW 10 KEL. BANDAHRARJO		Pembelian	62.656
75	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Baik	124	Jl. Banowati Raya	Tanah Milik Pemda	Pembelian	281.631
76	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	3	Jl. Brotojoyo Kel. Plombokan Kota Semarang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	524.324
77	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik	6	Jl. Hasanudin RT 14 RW 02 Kel. Bandarharjo	Tanah Milik Pemda	Pembelian	100.063
78	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik	6	Jl. Lengkong Kambing RT 05 RW 03 Kel. Dadapsari	Tanah Milik Pemda	Pembelian	69.919

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
79	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	Baik	200	Jl. Tambak rejo RT 1 RW 16 Kel. Tanjung Mas		Hibah	1.195.777
80	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	505	JL. BANDARHARJO TIMUR NO. 17	Tanah Milik Pemda	Pembelian	846.408
81	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	388	JL. LODAN RAYA NO.3 RT 08 RW 03	Tanah Milik Pemda	Pembelian	217.500
82	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	96	JL. LODAN RAYA RT 02 RW 05	Tanah Milik Pemda	Pembelian	320.151
83	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	54	JL. ARTERI RAYA/JL.HASANUDIN	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.500
84	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Kurang Baik	12	JL. LAYUR RT.05 RW.07	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.600
85	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Kurang Baik	53	JL. BEDAS SELATAN RT.08 RW.06	Tanah Milik Pemda	Pembelian	188.531
86	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	210	JL. BROTOJOYO V	Tanah Milik Pemda	Pembelian	323.803
87	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	385	JL. PATRIOT II / H 231	Tanah Milik Pemda	Pembelian	512.540
88	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	JL. KUALA MAS RAYA NO.41	Tanah Milik Pemda	Pembelian	148.782
89	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	180	JL. RONGGOWARSITO 42A	Tanah Milik Pemda	Pembelian	977.142
90	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	90	JL. TAMBRA DALAM UTARA	Tanah Milik Pemda	Pembelian	385.252
91	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Kurang Baik	373	JL. Bandarharjo Timur Kel. Bandarharjo	Tanah Milik Pemda	Pembelian	80.000
92	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	286	JL. CEMARA NO.9	Tanah Milik Pemda	Pembelian	150.000
93	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	250	JL. KUALA MAS RAYA NO.41	Tanah Milik Pemda	Pembelian	329.444
94	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	80	JL.KAKAP NO.72	Tanah Milik Pemda	Pembelian	111.902
95	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	65	Kp. PERANAKAN RT.02 RW.08	Tanah Milik Pemda	Pembelian	70.132
96	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	75	RW 03 Kel. Plombokan		Pembelian	157.272
97	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	15	Jl. Purwosari Perbalan 6 D Rt. 4 Rw 4 Kel. Purwosari		Pembelian	60.795
98	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	60	Kp. Pace Dadapsari Rw04 Rt02 Kel. Dadapsari		Pembelian	96.850

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
99	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	42	Jl. Tanggul Mas Timur VIII	Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.937
100	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	40	Jl. Lodan Raya RT 01 RW 05 Kelurahan Bandarharjo	Tanah Milik Pemda	Pembelian	74.939
101	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	75	Jl. Palgunadi Rw 4 Rt 5 Kel. Bulu Lor		Pembelian	84.298
102	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	76	Jl. Erowati Baru I Rw 8 Rt 4 Kel. Bulu Lor		Pembelian	87.420
103	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	409	Jl. Bedas Utara RT 02 RW 02 Kel. Dadapsari		Pembelian	89.519
104	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	15	Jl. Purwosari Perbalan Gg. Rw 5 Kel. Purwosari		Pembelian	70.682
105	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	50	RW. 02 Kel. Plombokan		Pembelian	99.068
106	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	10	RW. 05 Kel. Plombokan		Pembelian	51.643
107	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	115	Jl. Cerbonan Besar RT 03 RW 07 Dadapsari		Pembelian	74.509
108	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	96	Jl. Taman Brotojoyo No. 2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.699
109	Taman Permanen	Baik	137	Jl. Tanggul Mas Raya Kelurahan Panggung Lor		Pembelian	170.805
110	Taman Permanen	Baik	297	Jl. Taman Brotojoyo Kel. Panggung Kidul		Pembelian	163.700
111	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	250	Jl. Bandarharjo Timur Nom 17 Semarang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	187.601
112	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	40	Jl. Tambak Lorok RT 01 RW 14	Tanah Milik Pemda	Pembelian	664.810
113	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	37.43	Jl. Tmn Brotojoyo No.2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.850
114	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	838	Jalan Brotojoyo No.6 Semarang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	12.700
115	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Kurang Baik	385	Jl. Cemara No. 9	Tanah Milik Pemda	Pembelian	146.821
116	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Kurang Baik	1101	Jalan Brotojoyo V Semarang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	145.016
117	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	636	Jalan Tambra Dalam II / 9 Semarang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	74.694
118	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	270	Jalan Bandarharjo Timur No.17 Semarang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	95.939
119	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	162	jl. taman brotojoyo no 2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.000
120	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	56	JL. KUALA MAS RAYA NO.41	Tanah Milik Pemda	Pembelian	45.000

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
121	Tugu Pembangunan	Baik	4	JL. KALIBARU TIMUR RT 07 09	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.000
122	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	Baik	12	Jl. Tlagamas raya rt 07 rw 01 Kel. Panggung Lor		Pembelian	146.285
123	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	Baik	3	Jl. Kp. Raji Rt 6 Rw 3 Purwosari		Pembelian	65.691
124	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	Baik	4	Jl. Purwosari Perbalan Gang A Rt.9 Rw 4 Purwosari		Pembelian	55.725
125	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	Baik	3	Jl. Purwosari Perbalan Gg. G Rt. 5, 6 Rw 5 Purwosari		Pembelian	40.845
126	Pagar Permanen	Baik	500	RW 02 Kelurahan Bandarharjo	Tanah Milik Pemda	Pembelian	74.973
127	Pagar Permanen	Baik	12	Jl. Cumi Cumi Raya No. 3RW 07 RT 03 Kel. Bandahrarjo		Pembelian	63.556
128	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	171	Kelurahan Panggung Lor	Tanah Milik Pemda	Pembelian	45.969
TOTAL ASET BANGUNAN GEDUNG							**33.459.503**

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, per Desember 2024

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Semarang Utara.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Semarang Utara

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Pada dokumen Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Kecamatan Semarang Utara di bidang kewilayahan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
1	**Indikator Tujuan :**															
	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	92,00	93,00	94,00	95,00	N/A	86,96	97,58	96,5	96,78	N/A	94,52%	104,92%	102,65%	101,87%
2	**Indikator Sasaran :**															
a.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
b.	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
c.	Nilai AKIP	N/A	67,76	68,00	69,00	70,00	N/A	67,76	71,11	71,11	74,85	N/A	67,76	104.57	103.00	106.92
d.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	N/A	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
e.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	80,00%	75,00%	80,00%	80,00%	N/A	80,00%	89,00%	89,00%	86,72%	N/A	100,00%	118,67%	111,25%	108,4%
f.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	N/A	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	N/A	86,54%	90,00%	90,00%	100,00%	N/A	99,47%	100,00%	97,82%	105,26%
3	**Indikator kinerja :**															
a.	Persentase pelayanan kepada masyarakat	N/A	N/A	35,00%	56,00%	70,00%	N/A	N/A	96,98%	96,98%	92,30%	N/A	N/A	277,09%	225,13%	194,04%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	yang memanfaatkan teknologi informasi															
b.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	N/A	N/A	65,00%	70,00%	85,00%	N/A	N/A	70,00%	70,00%	78,83%	N/A	N/A	107,69%	103,85%	100,14%
c.	Nilai AKIP	N/A	N/A	73,00	77,00	78,00	N/A	N/A	73,35	73,35%	74,85	N/A	N/A	100,48	97,87	97,23
d.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	N/A	N/A	89,00%	88,00%	90,00%	N/A	N/A	88,00%	88,00%	95,00%	N/A	N/A	98,88%	99,44%	101,48%
e.	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	N/A	N/A	92,00%	91,00%	90,00%	N/A	N/A	91,00%	91,00%	100,00%	N/A	N/A	98,91%	99,46%	103,34%
f.	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	N/A	N/A	73,00%	75,00%	88,00%	N/A	N/A	73,00%	75,00%	95,00%	N/A	N/A	100,00%	100,00%	102,65%
g.	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	N/A	N/A	88,00%	87,00%	83,00%	N/A	N/A	87,00%	87,00%	84,61%	N/A	N/A	98,86%	99,43%	100,27%
h.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	N/A	N/A	91,00	88,00	82,00	N/A	N/A	1,00	-	1,00	N/A	N/A	1,10	-	1,16
i.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	N/A	N/A	70,00%	73,00%	72,00%	N/A	N/A	73,00%	73,00%	78,83%	N/A	N/A	104,29%	102,14%	104,59%
j.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	89,00%	80,00%	82,00%	N/A	N/A	80,00%	80,00%	0,13%	N/A	N/A	89,89%	94,94%	63,35%
k.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A	N/A	78,00	77,00	76,00	N/A	N/A	77,00	77,00	95,00	N/A	N/A	98,72	99,36	107,91

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	90,00%	87,00%	91,00%	N/A	N/A	96,98%	96,98%	95,56	N/A	N/A	107,76%	109,61%	108,45%
4.	**Indikator Program :**															
a.	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%
b.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%
c.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	N/A	N/A	91.00%	92.00%	93.00%	N/A	N/A	91.00%	96.98%	96.78%	N/A	N/A	100.00%	105.41%	104.06%
d.	Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%
e.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	N/A	N/A	97.00%	98.00%	99.00%	N/A	N/A	97.00%	98.00%	99.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%
f.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	10.00%	15.00%	20.00%	N/A	N/A	5.00%	15.00%	17.20%	N/A	N/A	50.00%	100.00%	86.00%
g.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A	N/A	90.00%	92.00%	95.00%	N/A	N/A	90.00%	92.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	105.26%

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yaitu membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.12
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	86,96	97,58	96,5	96,78

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Gambar 2.3
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

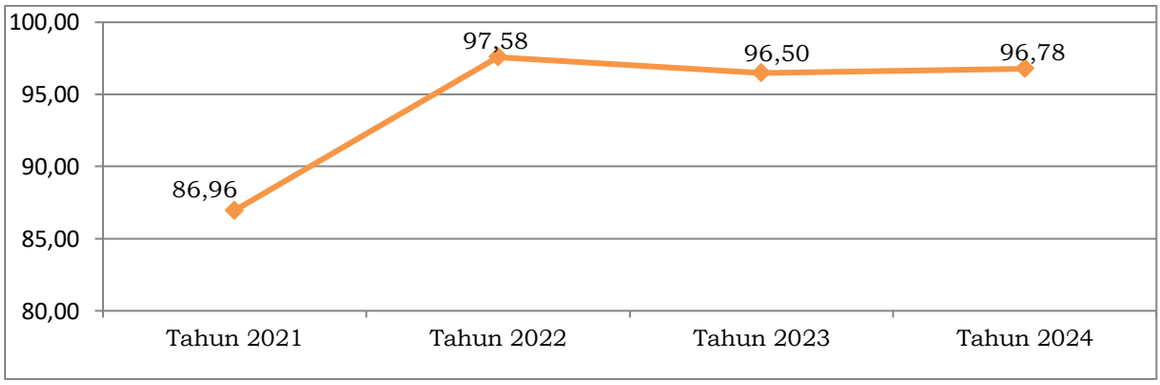

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Selain dari Indeks Kepuasan Masyarakat, kinerja pelayanan Kecamatan Kecamatan Semarang Utara juga dilihat dari Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN tetap, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.13
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Gambar 2.4
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020-2024

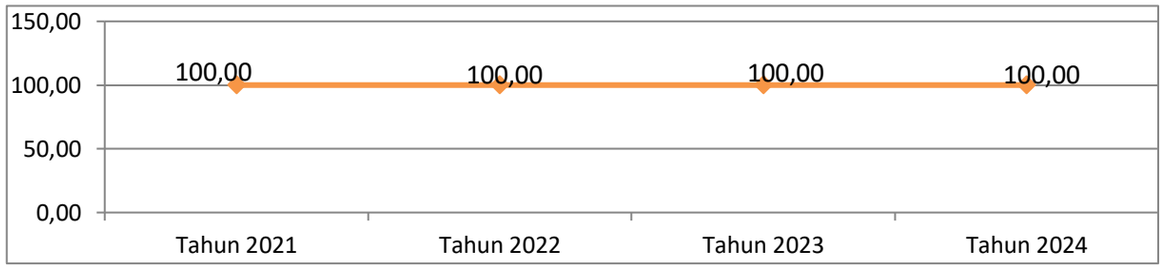

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Sedangkan untuk Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, tidak mengalami kenaikan, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.14
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Gambar 2.5
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

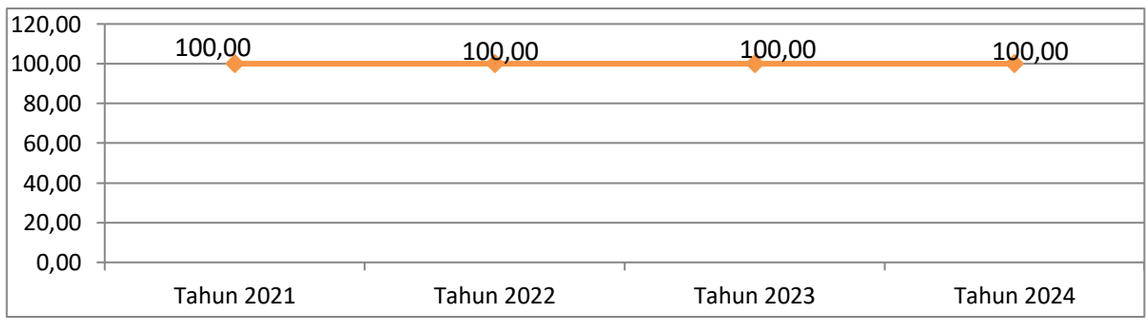

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021, sedangkan pada tahun 2022-2023 tetap, dan pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.15
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum	N/A	80,00%	89,00%	89,00%	86,72%

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Gambar 2.6
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

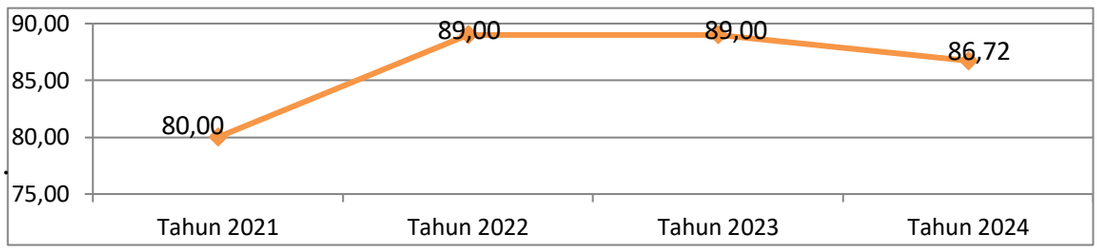

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Sedangkan untuk Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.16
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	N/A	86,54%	90,00%	90,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Gambar 2.7
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

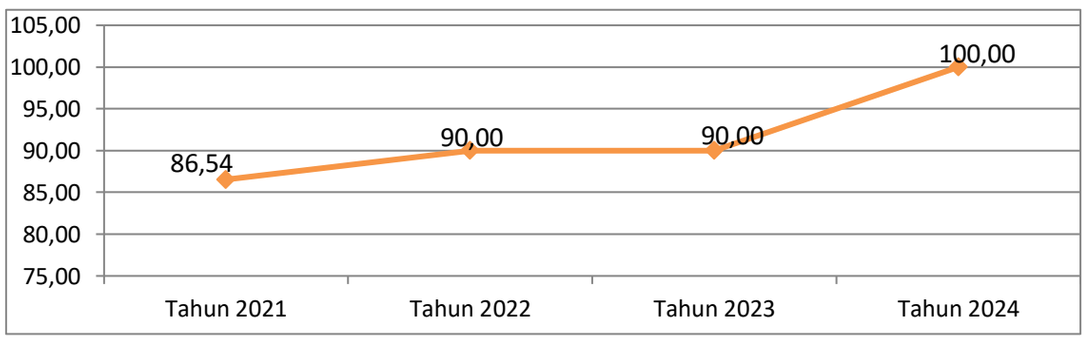

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Semarang Utara

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Semarang Utara. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Semarang Utara. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Semarang Utara.

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	JUMLAH BELANJA																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	12.143.178.157	12.409.995.159	14.201.520.931	N/A	N/A	11.735.685.280	11.863.081.234	13.327.673.180	N/A	N/A	96,64	95,59	93,85	5,54	4,48
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	3.551.783.119	3.243.093.735	3.640.208.127	N/A	N/A	3.412.594.232	3.192.483.813	3.574.363.577	N/A	N/A	96,08	98,44	98,19	6,98	6,14
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	N/A	N/A	22.083.357.053	27.048.591.547	29.873.234.200	N/A	N/A	21.569.073.354	26.892.099.637	28.151.234.073	N/A	N/A	97,67	99,42	94,24	10,98	9,79
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	102.000.000	108.611.428	96.506.400	N/A	N/A	102.000.000	106.308.500	95.806.400	N/A	N/A	100	97,88	99,27	5,88	4,70
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	53.500.000	20.550.000	79.300.000	N/A	N/A	50.800.000	20.550.000	79.000.000	N/A	N/A	94,95	100	99,62	115,83	114,66

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

c. Inovasi Kecamatan Semarang Utara

Terkait pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Semut Si PEKa (Sistem Pengingat agEnda KecamatAn)
2. SEMUT KEBAL SAKTI (Semarang Utara Kelas Balita Komprehensif Untuk Cegah dan Atasi Anak Stunting)
3. SEMUT NANJAK (SEMARANG UTARA NAGIH PEMBAYARAN PAJAK)
4. SEMUT GEMATI (SEMARANG UTARA BERGERAK MEMBERI DENGAN HATI)
5. SEMUT CEKATAN (Semarang Utara Cek Kesehatan Pangan)
6. SEMUT MLAMPAH (Semarang Utara Melakukan Pilah Sampah)
7. SEMUT PIJAR (Semarang Utara Bersih- Bersih Lingkungan Mulai Fajar)
8. SEMUT NANDUR (Semarang Utara Menanam Buah dan Sayur)
9. SEMUT NJAWIL (Semarang Utara Jelajah Wilayah)
10. SEMUT BAKULAN (Semarang Utraa memberikan bantuan sembako untuk lansia)
11. SEMUT GEMULAI (Gerakan Memasak Menu Lansia)
12. LOMBA HADROH
13. SEMUT BERSAHAJA (Semarang Utara Bersama Menjaga Keselamatan, Kesehatan Kerja)
14. Semut Numpak Becak (Semut NyUsun Perencanaan Anggaran Keuangan , BarEng Cah cAh Kelurahan)
15. SEMUT JULID (Semarang Utara Jemput Disabilitas)
16. SEMUT PAKAR (Semarang Utara Penertiban Parkir Liar)
17. SEMUT ANTIK (Semarang Utara layanAn Terpadu Informasi publiK)
18. Semut Delivery
19. SEMUT LINTAS (Semarang Utara Peduli dan Ramah Disabilitas)
20. SEMUT SKECU (SEMARANG UTARA SAYANG KE NENEK CUCU)
21. LOMBA UMKM
22. SEMUT LINMAS (Semarang Utara Perlindungan Masyarakat)
23. SEMUT BALA (Semarang Utara Bangun Wilayah)
24. SEMUT SIGAB (Semarang Utara Siaga Bencana)
25. SEMUT PEDANG LIMA (Semarang Utara Penertiban Pedagang Kaki Lima)
26. POKDARKAMTIBMAS (Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
27. SEMUT PATUH (Semarang Utara Patroli Rutin Harian)
28. SEMUT GADIS (Semarang Utara Tegakkan Disipin Pegawai)
29. SEMUT AKUR (Semarang Utara Apel Keliling Kelurahan)
30. SEMUT NGEGAS (Semarang Utara Ngapresiasi Pegawai Pensiun)
31. SEMUT MEKAR (Semarang Utara Memberi Reward Kinerja Karyawan/Pegawai

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah menurut petunjuk Inmendagri, setiap OPD harus mencantumkan “kelompok sasaran layanan”. Ini adalah kelompok masyarakat, komunitas, atau entitas lain yang akan menjadi penerima manfaat atau layanan dari kegiatan Kecamatan Semarang Utara. Inmendagri menekankan bahwa

perencanaan pembangunan daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kewenangan kecamatan seringkali berada di level yang lebih dekat ke masyarakat. Berdasarkan data dan RPJMD, berikut kelompok sasaran yang masuk kewenangan Kecamatan Semarang Utara:

Tabel 2.18
Kelompok Sasaran yang masuk Kewenangan di Kecamatan Semarang Utara

No	Kelompok Sasaran	Penjelasan / Dasar	Contoh Layanan yang Bisa Disediakan Kecamatan
1	Anak-anak balita & ibu hamil / menyusui	Karena isu stunting dan BBLR di wilayah Semarang Utara masih tinggi.	Posyandu; pemeriksaan gizi & tumbuh kembang; kelas parenting & penyuluhan gizi; bantuan tambahan makanan, layanan kesehatan dasar.
2	Keluarga miskin atau rentan sosial	RPJMD menekankan pemerataan, keadilan sosial, layanan dasar. Kegiatan lokal seperti bantuan masyarakat & program CSR di Tanjung Mas dan lainnya.	Bantuan sosial; layanan administrasi kependudukan & identitas; fasilitasi akses JKN, subsidi kesehatan; layanan bantuan langsung di kelurahan.
3	Warga di kelurahan / RW dengan masalah lingkungan & sanitasi	Kegiatan kampung sehat di RW di Kelurahan Panggung Lor (PHBS, kebersihan lingkungan) menunjukkan kebutuhan di bidang ini.	Program kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, drainase lokal, sanitasi; sosialisasi PHBS; penyediaan fasilitas umum kebersihan.
4	Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan umum & preventif	Imunisasi rutin, penanganan penyakit menular, gizi menjadi fokus.	Layanan puskesmas pembantu / keliling; kantor kecamatan sebagai pusat layanan vaksin, pemeriksaan kesehatan dasar; screening penyakit menular.
5	Pengguna ruang publik dan fasilitas sosial lokal	RPJMD mencantumkan infrastruktur inklusif dan aksesibilitas; kecamatan sebagai unit pelayanan terdekat.	Perbaikan dan penyediaan taman, tempat bermain anak, fasilitas olahraga, ruang interaksi masyarakat; ruang publik untuk kegiatan sosial/kebudayaan; pelayanan administrasi.
6	Kelompok usia produktif / masyarakat lokal UMKM	RPJMD dan program prioritas mengangkat ekonomi lokal & inklusi. Semarang Utara punya potensi daerah pesisir dan pelabuhan.	Pelatihan keterampilan kecil, usaha mikro, pembinaan lokal; pemberdayaan ekonomi warga terdekat; dukungan pemasaran lokal; pemanfaaatan CSR; pasar kelurahan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut:

- Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
- Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan
- Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan
- Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan masih perlu ditingkatkan

- Kondisi sarana dan prasarana lingkungan masih perlu perbaikan dan peningkatan
- Potensi lokal kewilayahan masih perlu dukungan pembinaan dan pengembangan
- Pengelolaan kebersihanwilayah masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan
- Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan
- Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bum Dan Bangunan

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Semarang Utara untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- Dukungan Pemerintah Kota Semarang terhadap Pemerintah Kecamatan Semarang Utara dalam penyusunan dan penerapan SOP dan SP, pengadaan sarana dan prasarana publik sesuai standar, serta pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dalam pelayanan publik
- Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya sarana prasarana di Kecamatan Semarang Utara untuk melaksanakan operasi penegakan perda dan menjaga ketertibandan ketentraman lingkungan.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yaitu dengan memfasilitasi kegiatan yang menjadi program kerjanya.
- Adanya perhatian yang besar dari Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan infrastruktur di wilayah
- Adanya perhatian yang besar dari Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan potensi lokal kewilayahan
- Keberadaan sarana prasarana pengelolaan kebersihan tercukupi baik di Kecamatan maupun di Kelurahan
- Adanya perhatian dari Forum Kota Sehat Kota Semarang kepada Kecamatan dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat
- Adanya stimulan pemberian hadiah dari Pemerintah Kota Semarang bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Semarang Utara

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Semarang Utara

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Semarang Utara diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Semarang Utara telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah **"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan"**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Semarang Utara terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **"Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan"**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah **"Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan".**

Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang dengan karakteristik kepadatan penduduk tinggi, kawasan pesisir yang rentan rob dan banjir, serta aktivitas sosial ekonomi yang kompleks. Sebagai bagian dari pembangunan Kota Semarang 2025–2029, kecamatan ini dihadapkan pada berbagai tantangan pelayanan publik, ketertiban, serta pemerataan akses layanan dasar. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kota Semarang 2025–2029, beberapa permasalahan pokok yang dihadapi Kecamatan Semarang Utara adalah sebagai berikut:

1. Ketertiban dan Keamanan Wilayah
   Masih ditemui keberadaan anak jalanan (kreak) di sejumlah titik jalan utama serta praktik parkir liar yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan terpadu antara kecamatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta perangkat daerah terkait. Selain itu, fenomena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dibeberapa ruas jalan dan ruang publik di wilayah Kecamatan Semarang Utara juga memerlukan perhatian serius. Disatu sisi, PKL memiliki kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan penyediaan kebutuhan harian dengan harga terjangkau, namun di sisi lain keberadaannya sering menimbulkan permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan tata ruang, serta gangguan kebershan dan kenyamanan lingkungan.
2. Keterbatasan Akses Pendidikan
   Sarana pendidikan di wilayah Semarang Utara, khususnya pada jenjang menengah, masih terbatas. Penerapan ketentuan zonasi sekolah menyebabkan sebagian anak usia sekolah kesulitan memperoleh akses pendidikan yang memadai, terutama di kawasan padat penduduk.
3. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan
   Permasalahan sampah masih menjadi tantangan utama, khususnya di kawasan Lingkar Tanjung dan wilayah pesisir. Penumpukan sampah disebabkan oleh tingginya aktivitas masyarakat, keterbatasan sarana prasarana (gerobak sampah & ong samapah), serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah.

4. Keterbatasan Infrastruktur Ramah Disabilitas
   Ketersediaan sarana prasarana publik yang ramah disabilitas masih sangat terbatas, baik pada jalan lingkungan, ruang publik, maupun fasilitas pelayanan dasar. Kondisi ini menimbulkan hambatan bagi kelompok disabilitas dalam memperoleh akses yang setara.
5. Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas
   Program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas belum berjalan optimal. Minimnya pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, serta wadah partisipasi inklusif menyebabkan kelompok disabilitas belum sepenuhnya berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif
   Data yang tersedia menunjukkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif belum optimal, dimana dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 80,00% pada Tahun 2020; 95,00% pada Tahun 2021; 84,00% pada Tahun 2022; 100,00% pada Tahun 2023; serta 100,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan.
   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
b. Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan
   Dalam kurun waktu tahun 2021-2024, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional mengalami fluktuasi yaitu sebesar 87,00% pada Tahun 2021; 58,00% pada Tahun 2022, 100,00% pada Tahun 2023; serta 100,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.
   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan serta sinergitas lintas sektor dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan hasil identifikasi kondisi eksisting Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Utara;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Utara;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Utra Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Utara
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Utara
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Utara
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Utara
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Utara
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Utara
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Utara
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Utara
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Utara

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.19
Rumusan Permasalahan
"Kualitas Kelembagaan Kecamatan Semarang Utara"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Utara	belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Utara belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Utara
2	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Utara	belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Utara

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Utara belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Utara masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Utara
3	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara elum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Utara belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Utara belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Utara

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan

agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif.”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk

mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan

memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga

menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Utara mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **"Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif"** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **"Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas."**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat" (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Semarang Utara mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat" (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran "Indeks Pelayanan Publik" (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran "meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang" (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran "Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan" (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah" (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Semarang Utara secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Kecamatan Semarang Utara secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dalam mencapai indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, khususnya dalam:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, melalui penguatan peran Unit Pelayanan Terpadu (UPT) serta peningkatan responsivitas pelayanan administratif kepada warga;
2. Pemberdayaan ekonomi lokal, dengan mendorong pengembangan potensi wilayah seperti sentra industri kecil menengah, pertanian perkotaan, dan kawasan perdagangan;

3. Pelestarian lingkungan hidup, melalui kolaborasi program kampung iklim, penanganan sampah berbasis masyarakat, serta pengawasan pembangunan berbasis tata ruang;

4. Penguatan budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan pembangunan berbasis RW/Kelurahan yang sinergis dengan visi inklusifitas kota.

5. Kecamatan Semarang Utara berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberi manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender (ARG) diproyeksikan sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Implementasi ARG juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.

6. Sebagai bagian dari Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terhadap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA. Bahkan pada Tahun 2024 Kelurahan Tanjung Mas meraih Juara I Kelurahan Layak Anak tingkat Kota Semarang.

7. Kecamatan Semarang Utara diarahkan sebagai Kecamatan Berdaya yang mampu memperkuat tata kelola pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada optimalisasi potensi lokal, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui penguatan kapasitas aparatur serta kolaborasi multipihak, kecamatan diharapkan menjadi simpul penggerak pembangunan partisipatif yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

8. Posyandu 6 SPM adalah pos pelayanan terpadu di kelurahan yang berfungsi mendukung pemenuhan enam standar pelayanan minimal pemerintah daerah, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman & ketertiban umum, serta sosial. Dengan demikian, Posyandu 6 SPM bukan hanya tempat layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi menjadi pusat layanan dasar multisektor di tingkat kelurahan. Posyandu ini menyediakan layanan edukasi, pendataan, pemantauan, serta fasilitasi masyarakat dalam enam bidang SPM, sesuai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin hak dasar warga negara.

9. Kerukunan umat beragama merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif. Kecamatan Semarang Utara memiliki keragaman agama dan keyakinan yang tinggi, sehingga diperlukan penguatan dialog antarumat beragama, fasilitasi kegiatan keagamaan, dan dukungan terhadap forum-forum kerukunan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Upaya ini diarahkan untuk mencegah potensi konflik sosial, memperkuat kohesi sosial, dan membangun budaya toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Selain kerukunan umat beragama, harmonisasi wilayah menjadi isu strategis yang harus terus dijaga. Kecamatan Semarang Utara sebagai kawasan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks menghadapi tantangan berupa potensi gesekan antarwarga, konflik kepentingan lahan, maupun perbedaan aspirasi pembangunan. Untuk itu, penguatan mekanisme mediasi, musyawarah, serta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan wilayah. Upaya harmonisasi ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan

Secara lengkap peranan Kecamatan Semarang Utara dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

Gambar 2.8
Peranan Kecamatan Semarang Utara dalam Mendukung Pencapaian
Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

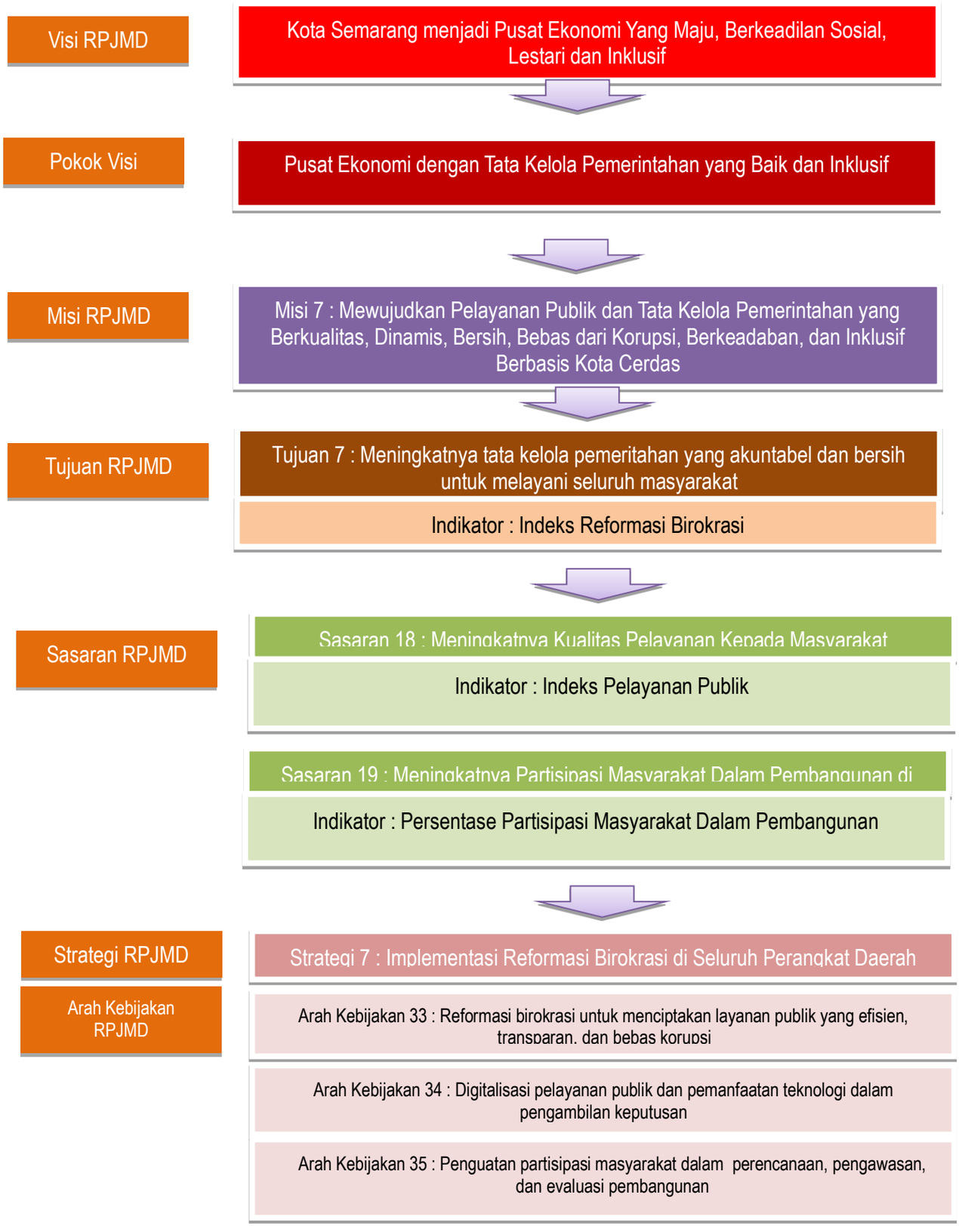

c. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga Dan Renstra Provinsi

Kecamatan Semarang Utara tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra/Kementrian Lembaga Dan Renstra Provinsi Jawa Tengah.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Semarang Utara . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Semarang Utara dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Semarang Utara dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Semarang Utara dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembengan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang untuk Kawasan Semarang Utara dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)
   - Rencana Penetapan Pusat Pelayanan
2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
   - Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perkotaan Lainnya.

Tabel 2.20 Penjabaran Kawasan di Semarang Utara

No	Aspek	Penjabaran Kawasan Semarang Utara
1	Peruntukan Ruang	- Zona permukiman padat perkotaan - Perdagangan dan jasa - Kawasan Pelabuhan - Ruang terbuka hijau
2	Arah Pengembangan	- Penguatan fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan dan ekonomi maritim - Pengembangan infrastruktur pesisir dan pengendalian banjir - Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi - Pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi bencana
3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Kegiatan sesuai peruntukan ruang - Memenuhi ketentuan KDB, KLB, dan KDH - Memperhatikan sempadan pantai dan sempadan sungai - - Penetapan RDTR dan peta zonasi teknis oleh Peraturan Walikota

Berikut penjabaran wilayah Semarang Utara yang berperan sebagai pusat industri, rekreasi, olahraga, dan perdagangan sesuai arahan Perda RTRW dan kondisi eksisting:

1. Industri
   Lokasi utama: Kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Emas dan sekitarnya (Kelurahan Tanjung Mas & Terboyo Kulon). Karakteristik:
   - Industri berbasis maritim, pergudangan, dan logistik pelabuhan.
   - Aktivitas bongkar muat barang, pengolahan hasil laut, dan distribusi.
   - Terdapat kawasan pergudangan besar dan terminal peti kemas.
2. Rekreasi
   Lokasi Kampung Bahari Tambak Lorok (potensi wisata pesisir dan kuliner), Kota Lama merupakan Kawasan Strategis Kota dengan fungsi utama sebagai kawasan cagar budaya dan pariwisata heritage. Karakteristik: Destinasi wisata pesisir, kuliner, dan budaya.
3. Olahraga
   Lapangan olahraga di masing-masing kelurahan merupakan potensi penting dalam pengembangan kegiatan olahraga baik tingkat RT maupun Kecamatan. Selain itu harapannya dapat menjadi wadah interaksi warga baik dalam bidang budaya, keshatan, ekonomi, dan pariwisata.
4. Perdagangan
   - Kampung Melayu Dadapsari
     Sudah menjadi pusat perdagangan tradisional dan grosir. Selain itu strategis dekat Pelabuhan Tanjung Emas dan jalur logistik.
   - Kawasan Kota Lama
     Potensi perdagangan berbasis wisata dan kreatif. Cocok untuk kafe, galeri, toko oleh-oleh, dan pusat kerajinan.
   - Sekitar Pasar Johar & Pasar Yaik
     Pusat perdagangan terbesar di Kota Semarang. Potensi modernisasi dan revitalisasi pasar.
   - Koridor Jalan Mpu Tantular & Jalan Layur ramai aktivitas niaga harian. Potensi dikembangkan jadi koridor perdagangan tematik.
   - Area Pelabuhan Tanjung Emas & sekitarnya. Cocok untuk perdagangan ekspor-impor dan logistik.

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Semarang Utara

Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang maka Dinas Kecamatan Semarang Utara tidak dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (4) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara adalah isu pilar keempat yaitu “Tata Kelola Kelembagaan” dengan masalah strategis “Belum optimalnya pelayanan public yang “transparan dan akuntabel”, dan isu strategis “Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab”, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.21
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Pilar	Masalah Strategis	Isu Strategis
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber : KLHS RPJMD Kota Semarang 2025 – 2029

Tabel 2.22
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 Kecamatan Semarang Utara

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
1	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Utara	V	V	V	V	V			

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
2	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Utara	V	V	V	V	V			

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang Kecamatan Semarang Utara

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Semarang Utara

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara adalah isu strategis ke tujuh, yaitu “Penyelenggaraan Good Governance”. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Semarang Utara, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Utara, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Tabel 2.23
Isu Perangkat Daerah
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Startegis PD
				Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penilaian nilai SAKIP Kota Semarang. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Pengadaan sarana dan prasarana	Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Utara	Perlunya memperkuat kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab	Perkembangan Teknologi Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelenggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Semarang Utara
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Utara	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	
Pengembangan pembinaan program kampung iklim (proklim) di wilayah permukiman dan sekolah – sekolah Kota Semarang -Adanya bantuan Raskin yang menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi warga miskin		belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara	Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	Demografi Global	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Penurunan Angka Kemiskinan	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk peningkatan taraf hidup masyarakat	Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara
			Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana	Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Semarang Utara

Sumber Kecamatan Semarang Utara

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten/Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Semarang Utara dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal "Reformasi Birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi"; "Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan"; "Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan".

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas **adalah "peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel"**, dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Semarang Utara Kabupaten/Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Semarang Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah

dalam mencapai visi dan misi **"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif"**. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Semarang Utara. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara agar dapat terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif. Dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, yaitu :

1. **"Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Utara"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).
2. **"Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Semarang Utara"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dimana Kecamatan Semarang Utara mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Semarang Utara.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Semarang Utara maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara

Dengan indikator sasaran yaitu :

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Utara**.
   Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Utara**
   Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara

Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Utara**".

Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan

Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Semarang Utara**".

Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Utara melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Semarang Utara.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat											
	TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Utara	Angka	0	92	93	94	95	96	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Utara	Angka	0	80	81	82	83	84	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Utara	Angka	76	74,90	74,95	75	75,05	75,10	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Utara	Angka	96,80	96,82	96,84	96,86	96,88	96,90	
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Utara	%	0	100	100	100	100	100	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan											
		SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	0	91	92	93	94	95	

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Semarang Utara mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Seamarang Utara dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Startegi
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Sikronisasi optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara	Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara	Penguatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara	Percepatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara	Perwujudan Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara

Sumber: Kecamatan Semarang Utara 2025

3.2.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Semarang Utara agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Semarang Utara merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan

harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

a. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Utara;
b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara;
c. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Utara.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

a. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Utara;
b. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
c. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara;
d. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Utara;
e. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Utara;
f. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Utara.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

a. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara;
b. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Utara;
c. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Utara;
d. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Utara.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Semarang Utara Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi 2. Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Utara 1. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara 2. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Utara 3. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Utara 4. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait 5. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara 6. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Utara 7. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Utara 8. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Utara	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	1. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara 2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Utara 3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Utara 4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Utara	

Sumber: Kecamatan Semarang Utara 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Utara
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Utara
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Utara
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Utara
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Utara
			6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Utara
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Utara
			3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Utara
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Utara

Sumber: Kecamatan Semarang Utara 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten/Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten/Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Semarang Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Teknik merumuskan Program, Kegiatan,Sub Kegiatan Kecamatan Semarang Utara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara**				**Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Utara**		Camat
		S1:Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Utara		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Utara		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekcam
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara		Sekcam
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Utara beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag PEK
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staff PEK
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staff PEK

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penyusunan Dokumen RKA SKPD		
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staff PEK
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staff PEK
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staff PEK
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staff PEK
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staff PEK
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag PEK
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staff PEK
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staff PEK
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staff PEK

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staff PEK
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staff PEK
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umpeg
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umpeg
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umpeg
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umpeg
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umpeg
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umpeg
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umpeg

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umpeg
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umpeg
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umpeg
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umpeg
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umpeg
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umpeg
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umpeg
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umpeg
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Staf Umpeg

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umpeg
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umpeg
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umpeg
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Kesos Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Staf Kesos Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kasi Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Pemerintahan Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Utara	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kasi Pelayanan Publik Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staff Pelayanan Publik Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Plombokan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Plombokan		Lurah Plombokan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Plombokan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit		Lurah Bulu Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyeluruh di Kelurahan Bulu Lor	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bulu Lor		
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Bulu Lor
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwosari		Lurah Purwosari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Purwosari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kuningan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kuningan		Lurah Kuningan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Kuningan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Panggung Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Panggung Lor		Lurah Panggung Lor
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Panggung Lor
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Panggung Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Panggung Kidul		Lurah Panggung Kidul
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Panggung Kidul
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bandarharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bandarharjo		Lurah Bandarharjo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Trantibum Kelurahan Bandarharjo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tanjung Mas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tanjung Mas		Lurah Tanjung Mas
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Tanjung Mas
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Dadapsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Dadapsari		Lurah Dadapsari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur/ Kasi pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Dadpsari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pembangunan Kecamatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Staf Pembangu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	nan Kecamatan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Plombokan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Plombokan		Lurah Plombokan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi Pembangunan Kelurahan Plombokan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bulu Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulu Lor		Lurah Bulu Lor
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi Pembangunan Kelurahan Bulu Lor
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Purwosari		Lurah Purwosari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi Pembangunan Kelurahan Purwosari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kuningan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kuningan		Lurah Kuningan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi Pembangunan Kelurahan Kuningan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Panggung Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Panggung Lor		Lurah Panggung Lor
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi Pembangunan Kelurahan Panggung Lor
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Panggung Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Panggung Kidul		Lurah Panggung Kidul
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi Pembangunan Kelurahan Panggung Kidul
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bandarharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bandarharjo		Lurah Bandarharjo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi Pembangu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							nan Kelurahan Bandarharjo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tanjung Mas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tanjung Mas		Lurah Tanjung Mas
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi Pembangunan Kelurahan Tanjung Mas
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Dadapsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Dadapsari		Lurah Dadapsari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seklur/ Kasi Pembangunan Kelurahan Dadpsari
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Utara	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantibum Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Trantibum Kecamatan
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Utara	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Pemerintahan Kecamtan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Pemerintahan Kecamtan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		S3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		Camat
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kasi Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kasi Pembangunan Kecamatan, Kasi Kesos Kecamatan dan Lurah
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Pembangunan/ Staf Kesos Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Plombokan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Plombokan		Lurah Plombokan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Plombokan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulu Lor		Lurah Bulu Lor
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Bulu Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwosari		Lurah Purwosari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Purwosari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kuningan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kuningan		Lurah Kuningan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Kuningan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panggung Lor		Lurah Panggung Lor
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Panggung Lor
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panggung Kidul		Lurah Panggung Kidul
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Panggung Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bandarharjo		Lurah Bandarharjo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Bandarharjo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tanjung Mas		Lurah Tanjung Mas
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Tanjung Mas
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Dadapsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dadapsari		Lurah Dadapsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Kesos Kelurahan Dadapsari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi Kesos/ Kasi Pemerintahan Kecamatan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakah	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Kesos Kecamtan, dan Staf Pemerintahan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Plombokan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Plombokan		Lurah Plombokan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Plombokan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bulu Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bulu Lor		Lurah Bulu Lor
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Bulu Lor
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwosari		Lurah Purwosari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Purwosari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kuningan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kuningan		Lurah Kuningan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Kuningan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Panggung Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Panggung Lor		Lurah Panggung Lor
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Panggung Lor
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Panggung Kidul		Lurah Panggung Kidul
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Panggung Kidul
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bandarharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bandarharjo		Lurah Bandarharjo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan/

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Trantibum Kelurahan Bandarharjo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tanjung Mas		Lurah Tanjung Mas
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Tanjung Mas
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Dadapsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Dadapsari		Lurah Dadapsari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan/ Trantibum Kelurahan Dadapsari
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		Kasi Kesos Kecamatan
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Kesos Kecamtan
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kasi Kesos Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Kesos Kecamtan

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Kecamatan Semarang Utara Kabupaten/Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3	Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
6	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah		

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	pemerintahan terkecil			
7	Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi			
8	Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
9	Pengembangan Musrenbang Tematik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Semarang Utara		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

Sumber: Kecamatan Semarang Utara 2025

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Semarang Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta

disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Kecamatan Semarang Utara
Kabupaten/Kota Semarang.

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
KEWILAYAHAN													
7.01 KECAMATAN SEMARANG UTARA				**54.764.055.957**		**58.524.641.314**		**60.161.423.105**		**60.462.076.662**		**61.171.256.139**	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				18.331.983.921		19.301.141.404		20.341.944.454		21.451.194.850		22.618.253.571	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan OPD yang berkualitas**	100%	100%	18.331.983.921	100%	19.301.141.404	100%	20.341.944.454	100%	21.451.194.850	100%	22.618.253.571	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	96,00 %	96,33%		97,00%		97,33 %		97,67%		98,00%		
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.700.400		12.519.428		13.395.788		14.333.493		15.336.838	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Utara beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan**	100%	100%	11.700.400	100%	12.519.428	100%	13.395.788	100%	14.333.493	100%	15.336.838	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 dok	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.350.000	4 Dokumen	5.724.500	6 Dokumen	6.125.215	5 dok	6.553.980	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				289.400		309.658		331.334		354.527		379.344	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1 dok	1 dok	289.400	1 dok	309.658	1 dok	331.334	1 dok	354.527	1 dok	379.344	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				418.900		448.223		479.599		513.171		549.092	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 dok	1 dok	418.900	1 dok	448.223	1 dok	479.599	1 dok	513.171	1 dok	549.092	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				289.400		309.658		331.334		354.527		379.344	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1 dok	1 dok	289.400	1 dok	309.658	1 dok	331.334	1 dok	354.527	1 dok	379.344	Kec. Semarang Utra

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				418.900		448.223		479.599		513.171		549.092	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 dok	1 dok	418.900	1 dok	448.223	1 dok	479.599	1 dok	513.171	1 dok	549.092	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				283.800		303.666		324.923		347.667		372.004	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 laporan	5 laporan	283.800	5 laporan	303.666	5 laporan	324.923	5 laporan	347.667	5 laporan	372.004	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.350.000	1 Dok	5.724.500	1 Dok	6.125.215	1 Dok	6.553.980	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.816.928.520		16.620.160.678		17.464.422.029		18.351.824.767		19.284.590.953	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan**	95%	100%	15.816.928.520	100%	16.620.160.678	100%	17.464.422.029	100%	18.351.824.767	100%	19.284.590.953	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.197.155.920		15.957.003.996		16.754.844.379		17.592.576.682		18.472.195.502	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	66 orang / bulan	81 orang/ bulan	15.197.155.920	81 orang/ bulan	15.957.003.996	81 orang / bulan	16.754.844.379	81 orang/ bulan	17.592.576.682	81 orang/ bulan		Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				614.112.000		657.099.840		703.096.829		752.313.607		804.975.559	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	614.112.000	12 dokumen	657.099.840	12 dokumen	703.096.829	12 dokumen	752.313.607	12 dokumen	804.975.559	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.685.600		2.873.592		3.074.743		3.289.975		3.520.274	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	2.685.600	1 Laporan	2.873.592	1 Laporan	3.074.743	1 Laporan	3.289.975	1 Laporan	3.520.274	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.685.600		2.873.592		3.074.743		3.289.975		3.520.274	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 laporan	12 laporan	2.685.600	12 laporan	2.873.592	12 laporan	3.074.743	12 laporan	3.289.975	12 laporan	3.520.274	Kec. Semarang Utra

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)												
X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				289.400		309.658		331.334		354.527		379.344	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	289.400	1 dokumen	309.658	1 dokumen	331.334	1 dokumen	354.527	1 dokumen	379.344	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000		16.050.000		17.173.500		18.375.645		19.661.940	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara	**Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara**	88,11 angka	89 Angka	15.000.000	90 Angka	16.050.000	91 Angka	17.173.500	92 Angka	18.375.645	93 Angka	19.661.940	
X.XX.01.2.05. 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.350.000	4 dokumen	5.724.500	4 dokumen	6.125.215	4 dokumen	6.553.980	Kec. Semarang Utra
X.XX.012.05. 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.700.000		11.449.000		12.250.430		13.107.960	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	80 orang	10.000.000	80 orang	10.700.000	80 orang	11.449.000	80 orang	12.250.430	80 orang	13.107.960	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				233.557.775		249.906.819		267.400.297		286.118.317		306.146.600	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara**	88,11 %	100%	233.557.775	100%	249.906.819	100%	267.400.297	100%	286.118.317	100%	306.146.600	
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				66.673.000		71.340.110		76.333.918		81.677.292		87.394.702	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 paket	3 paket	66.673.000	3 paket	71.340.110	3 paket	76.333.918	3 paket	81.677.292	3 paket	87.394.702	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.648.000		7.113.360		7.611.295		8.144.086		8.714.172	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5 paket	2 Paket	6.648.000	2 Paket	7.113.360	2 Paket	7.611.295	2 Paket	8.144.086	2 Paket	8.714.172	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.100.000		69.657.000		74.532.990		79.750.299		85.332.820	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48 laporan	12 Laporan	65.100.000	12 Laporan	69.657.000	12 Laporan	74.532.990	12 Laporan	79.750.299	12 Laporan	85.332.820	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.086.775		88.902.849		95.126.049		101.784.872		108.909.813	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14 laporan	12 laporan	83.086.775	12 laporan	88.902.849	12 laporan	95.126.049	12 laporan	101.784.872	12 laporan	108.909.813	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.050.000		12.893.500		13.796.045		14.761.768		15.795.092	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6 dokumen	2 dokumen	12.050.000	2 dokumen	12.893.500	2 dokumen	13.796.045	2 dokumen	14.761.768	2 dokumen	15.795.092	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.718.646		107.768.951		115.312.778		123.384.672		132.021.599	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara**	0%	100%	100.718.646	100%	107.768.951	100%	115.312.778	100%	123.384.672	100%	132.021.599	
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.718.646		97.640.398		113.348.274		141.703.742		168.959.632	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	12 Unit	100.718.646	12 Unit	97.640.398	12 Unit	113.348.274	12 Unit	141.703.742	12 Unit	168.959.632	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.963.930.180		2.101.405.293		2.248.503.663		2.405.898.919		2.574.311.844	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara yang selesai ditindaklanjuti**	80%	100%	1.963.930.180	100%	2.101.405.293	100%	2.248.503.663	100%	2.405.898.919	100%	2.574.311.844	
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.000.000		171.200.000		183.184.000		196.006.880		209.727.362	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	12 laporan	160.000.000	12 laporan	171.200.000	12 laporan	183.184.000	12 laporan	196.006.880	12 laporan	209.727.362	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.803.930.180		1.930.205.293		2.065.319.663		2.209.892.039		2.364.584.482	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12 laporan	1.803.930.180	12 laporan	1.930.205.293	12 laporan	2.065.319.663	12 laporan	2.209.892.039	12 laporan	2.364.584.482	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.148.400		203.458.788		217.700.902		232.939.967		249.245.765	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara sesuai ketentuan**	100%	100%	190.148.400	100%	203.458.788	100%	217.700.902	100%	232.939.967	100%	249.245.765	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
x.xx.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.884.000		153.955.880		164.732.792		176.264.087		188.602.573	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	23 Unit	143.884.000	23 Unit	153.955.880	23 Unit	164.732.792	23 Unit	176.264.087	23 Unit	188.602.573	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.264.400		38.802.908		41.519.111		44.425.450		47.535.232	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10 Unit	36.264.400	10 Unit	38.802.908	10 Unit	41.519.111	10 Unit	44.425.450	10 Unit	47.535.232	Kec. Semarang Utra
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.700.000		11.449.000		12.250.430		13.107.960	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26 unit	27 Unit	10.000.000	27 Unit	10.700.000	27 Unit	11.449.000	27 Unit	12.250.430	27 Unit	13.107.960	Kec. Semarang Utra
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.066.426.980		1.141.076.869		1.220.952.249		1.306.418.907		1.397.868.230	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di**	96,78	100%	1.066.426.980	100%	1.141.076.869	100,0 %	1.220.952.249	100,0%	1.306.418.907	100%	1.397.868.230	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
responsif pada kebutuhan masyarakat	**kecamatan yang tepat waktu**												
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				115.750.000		123.852.500		132.522.175		141.798.727		151.724.638	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait**	-	100%	115.750.000	100%	123.852.500	100%	132.522.175	100%	141.798.727	100%	151.724.638	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1.500.000		1.605.000		1.717.350		1.837.565		1.966.194	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	-	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.605.000	1 laporan	1.717.350	1 laporan	1.837.565	1 laporan	1.966.194	Kec. Semarang Utra
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	-	100%	114.250.000	100%	122.247.500	100%	130.804.825	100%	139.961.163	100%	149.758.444	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan				114.250.000		122.247.500		130.804.825		139.961.163		149.758.444	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5 dokumen	3 dokumen	114.250.000	3 dokumen	122.247.500	3 dokumen	130.804.825	3 dokumen	139.961.163	3 dokumen	149.758.444	Kec. Semarang Utra
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				805.545.200		861.933.364		922.268.699		986.827.508		1.055.905.434	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Utara	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Utara**	100%	100%	805.545.200	100%	861.933.364	100%	922.268.699	100%	986.827.508	100%	1.055.905.434	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				183.545.200		196.393.364		210.140.899		224.850.762		240.590.316	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5 Laporan	12 Laporan	183.545.200	12 Laporan	196.393.364	12 Laporan	210.140.899	12 Laporan	224.850.762	12 Laporan	240.590.316	Kec. Semarang Utra
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%	64.000.000	100%	68.480.000	100%	73.273.600	100%	78.402.752	100%	83.890.945	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
secara menyeluruh di Kelurahan Plombokan	yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Plombokan												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				64.000.000		68.480.000		73.273.600		78.402.752		83.890.945	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	64.000.000	12 Laporan	68.480.000	12 Laporan	73.273.600	12 Laporan	78.402.752	12 Laporan	83.890.945	Kel. Plombokan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bulu Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bulu Lor	100%	100%	69.000.000	100%	73.830.000	100%	78.998.100	100%	84.527.967	100%	90.444.925	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				69.000.000		73.830.000		78.998.100		84.527.967		90.444.925	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	12 Laporan	73.830.000	12 Laporan	78.998.100	12 Laporan	84.527.967	12 Laporan	90.444.925	Kel. Bulu Lor
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	100%	100%	64.000.000	100%	68.480.000	100%	73.273.600	100%	78.402.752	100%	83.890.945	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
secara menyeluruh di Kelurahan Purwosari	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwosari												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				64.000.000		68.480.000		73.273.600		78.402.752		83.890.945	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	64.000.000	12 Laporan	68.480.000	12 Laporan	73.273.600	12 Laporan	78.402.752	12 Laporan	83.890.945	Kel. Purwosari
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kuningan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kuningan	100%	100%	71.000.000	100%	75.970.000	100%	81.287.900	100%	86.978.053	100%	93.066.517	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				71.000.000		75.970.000		81.287.900		86.978.053		93.066.517	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	12 Laporan	75.970.000	12 Laporan	81.287.900	12 Laporan	86.978.053	12 Laporan	93.066.517	Kel. Kuningan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	100%	100%	76.000.000	100%	81.320.000	100%	87.012.400	100%	93.103.268	100%	99.620.497	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kelurahan Panggung Lor	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Panggung Lor												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				76.000.000		81.320.000		87.012.400		93.103.268		99.620.497	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	12 Laporan	81.320.000	12 Laporan	87.012.400	12 Laporan	93.103.268	12 Laporan	99.620.497	Kel. Panggung Lor
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Panggung Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Panggung Kidul	100%	100%	61.000.000	100%	65.270.000	100%	69.838.900	100%	74.727.623	100%	79.958.557	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				61.000.000		65.270.000		69.838.900		74.727.623		79.958.557	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	61.000.000	12 Laporan	65.270.000	12 Laporan	69.838.900	12 Laporan	74.727.623	12 Laporan	79.958.557	Kel. Panggung Kidul
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	100%	100%	73.000.000	100%	78.110.000	100%	83.577.700	100%	89.428.139	100%	95.688.109	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kelurahan Bandarharjo	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bandarharjo												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				73.000.000		78.110.000		83.577.700		89.428.139		95.688.109	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	73.000.000	12 Laporan	78.110.000	12 Laporan	83.577.700	12 Laporan	89.428.139	12 Laporan	95.688.109	Kel. Bandarharjo
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tanjung Mas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tanjung Mas	100%	100%	78.000.000	100%	83.460.000	100%	89.302.200	100%	95.553.354	100%	102.242.089	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	78.000.000		83.460.000		89.302.200		95.553.354		102.242.089	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000	12 Laporan	83.460.000	12 Laporan	89.302.200	12 Laporan	95.553.354	12 Laporan	102.242.089	Kel. Tanjung Mas
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%	102.242.089	100%	70.620.000	100%	75.563.400	100%	80.852.838	100%	86.512.537	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
secara menyeluruh di Kelurahan Dadapsari	yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Dadapsari												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.242.089		70.620.000		75.563.400		80.852.838		86.512.537	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	102.242.089	12 Laporan	70.620.000	12 Laporan	75.563.400	12 Laporan	80.852.838	12 Laporan	86.512.537	Kel. Dadasari
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				145.131.780		155.291.005		166.161.375		177.792.671		190.238.158	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	0%	100%	145.131.780	100%	155.291.005	100%	166.161.375	100%	177.792.671	100%	190.238.158	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				100.131.780		107.141.005		114.640.875		122.665.736		131.252.338	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	100.131.780	12 Laporan	107.141.005	12 Laporan	114.640.875	12 laporan	122.665.736	12 laporan	131.252.338	Kec. Semarang Utra

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Plombokan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Plombokan	0%	100%	5.000.000	100%	5.350.000	100%	5.724.500	100%	6.125.215	100%	6.553.980	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.350.000	12 Laporan	5.724.500	12 Laporan	6.125.215	12 Laporan	6.553.980	Kel. Plombokan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bulu Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulu Lor	0%	100%	5.000.000	100%	5.350.000	100%	5.724.500	100%	6.125.215	100%	6.553.980	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.350.000	12 Laporan	5.724.500	12 Laporan	6.125.215	12 Laporan	6.553.980	Kel. Bulu Lor
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Purwosari	0%	100%	5.000.000	100%	5.350.000	100%	5.724.500	100%	6.125.215	100%	6.553.980	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.350.000	12 Laporan	5.724.500	12 Laporan	6.125.215	12 Laporan	6.553.980	Kel. Purwosari
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kuningan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kuningan	0%	100%	5.000.000	100%	5.350.000	100%	5.724.500	100%	6.125.215	100%	6.553.980	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.350.000	12 Laporan	5.724.500	12 Laporan	6.125.215	12 Laporan	6.553.980	Kel. Kuningan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Panggung Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Panggung Lor	0%	100%	5.000.000	100%	5.350.000	100%	5.724.500	100%	6.125.215	100%	6.553.980	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.350.000	12 Laporan	5.724.500	12 Laporan	6.125.215	12 Laporan	6.553.980	Kel. Panggung Lor
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Panggung Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Panggung Kidul	0%	100%	5.000.000	100%	5.350.000	100%	5.724.500	100%	6.125.215	100%	6.553.980	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.350.000	12 Laporan	5.724.500	12 Laporan	6.125.215	12 Laporan	6.553.980	Kel. Panggung Kidul
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bandarharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bandarharjo	0%	100%	5.000.000	100%	5.350.000	100%	5.724.500	100%	6.125.215	100%	6.553.980	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.350.000	12 Laporan	5.724.500	12 Laporan	6.125.215	12 Laporan	6.553.980	Kel. Bandarharjo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tanjung Mas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tanjung Mas	0%	100%	5.000.000	100%	5.350.000	100%	5.724.500	100%	6.125.215	100%	6.553.980	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.350.000	12 Laporan	5.724.500	12 Laporan	6.125.215	12 Laporan	6.553.980	Kel. Tanjung Mas
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Dadapsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Dadapsari	0%	100%	5.000.000	100%	5.350.000	100%	5.724.500	100%	6.125.215	100%	6.553.980	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000		5.350.000		5.724.500		6.125.215		6.553.980	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.350.000	12 Laporan	5.724.500	12 Laporan	6.125.215	12 Laporan	6.553.980	Kel. Dadapsari
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				125.782.129		139.089.328		144.881.241		145.945.133		148.454.634	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100%	100%	125.782.129	100%	139.089.328	100%	144.881.241	100%	145.945.133	100%	148.454.634	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				125.782.129		139.089.328		144.881.241		145.945.133		148.454.634	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**	13 laporan	12 Kegiatan	125.782.129	12 Kegiatan	139.089.328	12 Kegiatan	144.881.241	12 Kegiatan	145.945.133	12 Kegiatan	148.454.634	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				125.782.129		139.089.328		144.881.241		145.945.133		148.454.634	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 laporan	12 laporan	125.782.129	12 laporan	139.089.328	12 laporan	144.881.241	12 laporan	145.945.133	12 laporan	148.454.634	Kec. Semarang Utra

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)												
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				157.172.927		173.801.135		181.038.506		182.367.908		185.503.692	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	80%	82%	157.172.927	84%	173.801.135	86%	181.038.506	88%	182.367.908	90%	185.503.692	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				157.172.927		173.801.135		181.038.506		182.367.908		185.503.692	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	6 kegiatan	9 kegiatan	157.172.927	9 kegiatan	173.801.135	9 kegiatan	181.038.506	9 kegiatan	182.367.908	9 kegiatan	185.503.692	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				157.172.927		173.801.135		181.038.506		182.367.908		185.503.692	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 orang	450 orang	157.172.927	450 orang	173.801.135	450 orang	181.038.506	450 orang	182.367.908	450 orang	185.503.692	Kec. Semarang Utra

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				35.082.690.000		37.769.532.578		38.272.606.655		37.376.149.864		36.821.176.012	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	99%	100%	35.082.690.000	100%	37.769.532.578	100%	38.272.606.655	100%	37.376.149.864	100%	36.821.176.012	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.224.000.000		1.457.878.778		1.635.778.972		1.784.768.219		1.965.865.948	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	**Jumlah laporan hasil musrenbang**	-	10 Laporan	1.224.000.000	10 Laporan	1.457.878.778	10 Laporan	1.635.778.972	10 Laporan	1.784.768.219	10 Laporan	1.965.865.948	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60.000.000		64.199.998		68.693.993		73.502.579		78.647.771	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	4 lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	64.199.998	6 Lembaga Kemasyarakatan	68.693.993	6 Lembaga Kemasyarakatan	73.502.579	6 Lembaga Kemasyarakatan	78.647.771	Kec. Semarang Utra
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	321 kegiatan	10 kegiatan	315.000.000	10 kegiatan	351.472.678	10 kegiatan	369.725.349	10 kegiatan	376.900.842	10 kegiatan	388.940.190	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				315.000.000		351.472.678		369.725.349		376.900.842		388.940.190	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	315.000.000	6 Pokmas / Ormas	351.42.678	6 Pokmas / Ormas	369.725.349	6 Pokmas / Ormas	376.900.842	6 Pokmas / Ormas	388.940.190	Kec. Semarang Utra
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Plombokan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Plombokan	-	10 kegiatan	75.200.000,00	10 kegiatan	95.366.278	10 kegiatan	112.517.691	10 kegiatan	128.438.245	10 kegiatan	147.186.083	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				75.200.000,00		95.366.278		112.517.691		128.438.245		147.186.083	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	75.200.000,00	6 Pokmas / Ormas	95.366.278	6 Pokmas / Ormas	112.517.691	6 Pokmas / Ormas	128.438.245	6 Pokmas / Ormas	147.186.083	Kel. Plombokan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulu Lor	-	10 kegiatan	96.200.000	10 kegiatan	117.794.278	10 kegiatan	135.042.131	10 kegiatan	150.196.854	10 kegiatan	168.357.210	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				96.200.000		117.794.278		135.042.131		150.196.854		168.357.210	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	96.200.000	6 Pokmas / Ormas	117.794.278	6 Pokmas / Ormas	135.042.131	6 Pokmas / Ormas	150.196.854	6 Pokmas / Ormas	168.357.210	Kel Bulu Lor

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwosari	-	10 kegiatan	75.200.000	10 kegiatan	95.366.278	10 kegiatan	112.517.691	10 kegiatan	128.438.245	10 kegiatan	147.186.083	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				75.200.000		95.366.278		112.517.691		128.438.245		147.186.083	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	75.200.000	6 Pokmas / Ormas	95.366.278	6 Pokmas / Ormas	112.517.691	6 Pokmas / Ormas	128.438.245	6 Pokmas / Ormas	147.186.083	Kel. Purwosari
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kuningan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kuningan	-	10 kegiatan	92.000.000	10 kegiatan	113.308.678	10 kegiatan	130.537.243	10 kegiatan	145.845.132	10 kegiatan	164.122.984	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				92.000.000		113.308.678		130.537.243		145.845.132		164.122.984	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	92.000.000	6 Pokmas / Ormas	113.308.678	6 Pokmas / Ormas	130.537.243	6 Pokmas / Ormas	145.845.132	6 Pokmas / Ormas	164.122.984	Kel. Kuningan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panggung Lor	-	10 kegiatan	108.800.000	10 kegiatan	131.251.078	10 kegiatan	148.556.796	10 kegiatan	163.252.020	10 kegiatan	181.059.886	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				108.800.000		131.251.078		148.556.796		163.252.020		181.059.886	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	108.800.000	6 Pokmas / Ormas	131.251.078	6 Pokmas / Ormas	148.556.796	6 Pokmas / Ormas	163.252.020	6 Pokmas / Ormas	181.059.886	Kel. Panggung Lor
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panggung Kidul	-	10 kegiatan	83.600.000	10 kegiatan	104.337.478	10 kegiatan	121.527.467	10 kegiatan	137.141.688	10 kegiatan	155.654.534	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				83.600.000		104.337.478		121.527.467		137.141.688		155.654.534	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	83.600.000	6 Pokmas / Ormas	104.337.478	6 Pokmas / Ormas	121.527.467	6 Pokmas / Ormas	137.141.688	6 Pokmas / Ormas	155.654.534	Kel. Panggung Kidul
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bandarharjo	-	10 kegiatan	108.800.000	10 kegiatan	131.251.078	10 kegiatan	148.556.796	10 kegiatan	163.252.020	10 kegiatan	181.059.886	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				108.800.000		131.251.078		148.556.796		163.252.020		181.059.886	
Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5 Pokmas /	6 Pokmas	108.800.000	6 Pokma	131.251.078	6 Pokmas /	148.556.796	6 Pokmas	163.252.020	6 Pokmas	181.059.886	Kel. Bandarharjo

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Ormas	/ Ormas		s / Ormas		Ormas		/ Ormas		/ Ormas		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tanjung Mas	-	10 kegiatan	117.200.000	10 kegiatan	140.222.278	10 kegiatan	157.566.572	10 kegiatan	171.955.463	10 kegiatan	189.528.337	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				117.200.000		140.222.278		157.566.572		171.955.463		189.528.337	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	117.200.000	6 Pokmas / Ormas	140.222.278	6 Pokmas / Ormas	157.566.572	6 Pokmas / Ormas	171.955.463	6 Pokmas / Ormas	189.528.337	Kel. Tanjung Mas
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Dadapsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dadapsari	-	10 kegiatan	92.000.000	10 kegiatan	113.308.678	10 kegiatan	130.537.243	10 kegiatan	145.845.132	10 kegiatan	164.122.984	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				92.000.000		113.308.678		130.537.243		145.845.132		164.122.984	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	92.000.000	6 Pokmas / Ormas	113.308.678	6 Pokmas / Ormas	130.537.243	6 Pokmas / Ormas	145.845.132	6 Pokmas / Ormas	164.122.984	Kel. Dadasari
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga				33.858.690.000		36.311.653.800		36.636.827.683		35.591.381.646		34.855.310.064	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya**	50 Laporan	5 Laporan	127.000.000	5 Laporan	150.688.678	5 Laporan	168.077.977	5 Laporan	182.109.481	5 Laporan	199.408.196	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000		150.688.678		168.077.977		182.109.481		199.408.196	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga	4 lembaga	127.000.000	4 lembaga	150.688.678	4 lembaga	168.077.977	4 lembaga	182.109.481	4 lembaga	199.408.196	Kec. Semarang Utra
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Plombokan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Plombokan	50 Laporan	5 Laporan	2.364.800.000	5 Laporan	2.540.659.078	5 Laporan	2.568.325.250	5 Laporan	2.500.748.347	5 Laporan	2.455.443.812	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.364.800.000		2.540.659.078		2.568.325.250		2.500.748.347		2.455.443.812	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 lembaga	6 lembaga	2.364.800.000	6 lembaga	2.540.659.078	6 lembaga	2.568.325.250	6 lembaga	2.500.748.347	6 lembaga	2.455.443.812	Kel. Plombokan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bulu Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bulu Lor	50 Laporan	5 Laporan	3.792.200.000	5 Laporan	4.065.122.278	5 Laporan	4.099.343.642	5 Laporan	3.979.712.113	5 Laporan	3.894.475.557	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan				3.792.200.000		4.065.122.278		4.099.343.642		3.979.712.113		3.894.475.557	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Lembaga Kemasyarakatan													
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 lembaga	6 lembaga	3.792.200.000	6 lembaga	4.065.122.278	6 lembaga	4.099.343.642	6 lembaga	3.979.712.113	6 lembaga	3.894.475.557	Kel. Bulu Lor
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwosari	50 Laporan	5 Laporan	2.233.280.000	5 Laporan	2.400.195.718	5 Laporan	2.427.257.898	5 Laporan	2.364.477.284	5 Laporan	2.322.852.068	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.233.280.000		2.400.195.718		2.427.257.898		2.364.477.284		2.322.852.068	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 lembaga	6 lembaga	2.233.280.000	6 lembaga	2.400.195.718	6 lembaga	2.427.257.898	6 lembaga	2.364.477.284	6 lembaga	2.322.852.068	Kel. Purwosari
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kuningan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kuningan	50 Laporan	5 Laporan	4.186.760.000	5 Laporan	4.486.512.358	5 Laporan	4.522.545.699	5 Laporan	4.388.525.300	5 Laporan	4.292.250.788	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.186.760.000		4.486.512.358		4.522.545.699		4.388.525.300		4.292.250.788	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 lembaga	6 lembaga	4.186.760.000	6 lembaga	4.486.512.358	6 lembaga	4.522.545.699	6 lembaga	4.388.525.300	6 lembaga	4.292.250.788	Kel. Kuningan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang	50 Laporan	5 Laporan	5.832.320.000	5 Laporan	6.243.970.438	5 Laporan	6.287.560.849	5 Laporan	6.093.529.935	5 Laporan	5.951.220.298	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Panggung Lor	seharusnya di Kelurahan Panggung Lor												
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.832.320.000		6.243.970.438		6.287.560.849		6.093.529.935		5.951.220.298	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 lembaga	6 lembaga	5.832.320.000	6 lembaga	6.243.970.438	6 lembaga	6.287.560.849	6 lembaga	6.093.529.935	6 lembaga	5.951.220.298	Kel. Panggung Lor
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Panggung Kidul	50 Laporan	5 Laporan	1.443.120.000	5 Laporan	1.556.304.838	5 Laporan	1.579.738.287	5 Laporan	1.545.773.340	5 Laporan	1.526.253.131	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.443.120.000		1.556.304.838		1.579.738.287		1.545.773.340		1.526.253.131	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 lembaga	6 lembaga	1.443.120.000	6 lembaga	1.556.304.838	6 lembaga	1.579.738.287	6 lembaga	1.545.773.340	6 lembaga	1.526.253.131	Kel. Panggung Kidul
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bandarharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bandarharjo	50 Laporan	5 Laporan	4.822.960.000	5 Laporan	5.165.973.958	5 Laporan	5.204.928.984	5 Laporan	5.047.707.554	5 Laporan	4.933.635.121	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.822.960.000		5.165.973.958		5.204.928.984		5.047.707.554		4.933.635.121	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bandarharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bandarharjo	5 lembaga	6 lembaga	4.822.960.000	6 lembaga	5.165.973.958	6 lembaga	5.204.928.984	6 lembaga	5.047.707.554	6 lembaga	4.933.635.121	Kel. Bandarharjo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tanjung Mas	50 Laporan	5 Laporan	6.096.400.000	5 Laporan	6.526.007.878	5 Laporan	6.570.811.050	5 Laporan	6.367.149.629	5 Laporan	6.217.452.260	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				6.096.400.000		6.526.007.878		6.570.811.050		6.367.149.629		6.217.452.260	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 lembaga	6 lembaga	6.096.400.000	6 lembaga	6.526.007.878	6 lembaga	6.570.811.050	6 lembaga	6.367.149.629	6 lembaga	6.217.452.260	Kel. Tanjung Mas
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Dadapsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Dadapsari	50 Laporan	5 Laporan	2.936.800.000	5 Laporan	3.151.555.078	5 Laporan	3.181.848.103	5 Laporan	3.093.411.422	5 Laporan	3.032.104.985	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.936.800.000		3.151.555.078		3.181.848.103		3.093.411.422		3.032.104.985	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 lembaga	6 lembaga	2.936.800.000	6 lembaga	3.151.555.078	6 lembaga	3.181.848.103	6 lembaga	3.093.411.422	6 lembaga	3.032.104.985	Kel. Dadapsari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	**Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan**	100,00%	100,00%	7.750.000	100,00%	8.292.500	100,00%	8.872.975	100,00%	9.494.083	100,00%	10.158.669	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				7.750.000		8.292.500		8.872.975		9.494.083		10.158.669	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1 lembaga	1 lembaga	7.750.000	1 lembaga	8.292.500	1 lembaga	8.872.975	1 lembaga	9.494.083	1 lembaga	10.158.669	Kec. Semarang Utra
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	**Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	100,00%	100,00%	15.300.000	100,00%	16.371.000	100,00%	17.516.970	100,00%	18.743.158	100,00%	20.055.179	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				15.300.000		16.371.000		17.516.970		18.743.158		20.055.179	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3 laporan	12 laporan	15.300.000	12 laporan	16.371.000	12 laporan	17.516.970	12 laporan	18.743.158	12 laporan	20.055.179	Kec. Semarang Utra

Sumber: Kecamatan Semarang Utara 2025

Dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2025-2029, Kecamatan turut berperan aktif dalam peningkatan PAD melalui retribusi penyewaan aset di kecamatan dan kelurahan. Berikut akan dijelaskan secara rinci untuk target pendapatan Kecamatan Semarang Utara .

Tabel 4.4.
Rencana Pendapatan Kecamatan Semarang Utara
Kota Semarang

No.	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Kegiatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.160.000	8.089.200	8.655.444	9.261.325	9.909.618	10.603.291	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Semarang Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semarang Utara yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Indikator T.1.1**: Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Utara	Angka	0	92	93	94	95	96	
2	**Indikator T.1.2 :** Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Utara	Angka	0	80	81	82	83	84	
3	**Indikator S.2.1 :** Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Utara	Persen	0	100	100	100	100	100	
4	**Indikator S.3.1 :** Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	0	91	92	93	94	95	

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Unsur Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Semarang Utara
Kabupaten/Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	UNSUR KEWILAYAHAN								
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten/Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Semarang Utara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan unsur penunjang kewilayahan Kecamatan Semarang Utara dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Semarang Utara 2025-2029. Renstra Kecamatan Semarang Utara ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Semarang Utara.

Permasalahan belum optimalnya kualitas kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Semarang Utara. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Semarang Utara sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kelembagaan,pelayanan dan pemberdayaan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten/Kota Semarang.

38. KECAMATAN SEMARANG BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta industri di wilayah Tengah Pulau Jawa. Dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat, diperlukan perencanaan Pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan urbanisasi, meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, serta memperkuat daya saing kota. Perencanaan ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya Semarang sebagai kota modern yang inklusif, Tangguh dan berwawasan lingkungan.

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang maka Kecamatan Semarang Barat wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Kecamatan Semarang Barat.

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

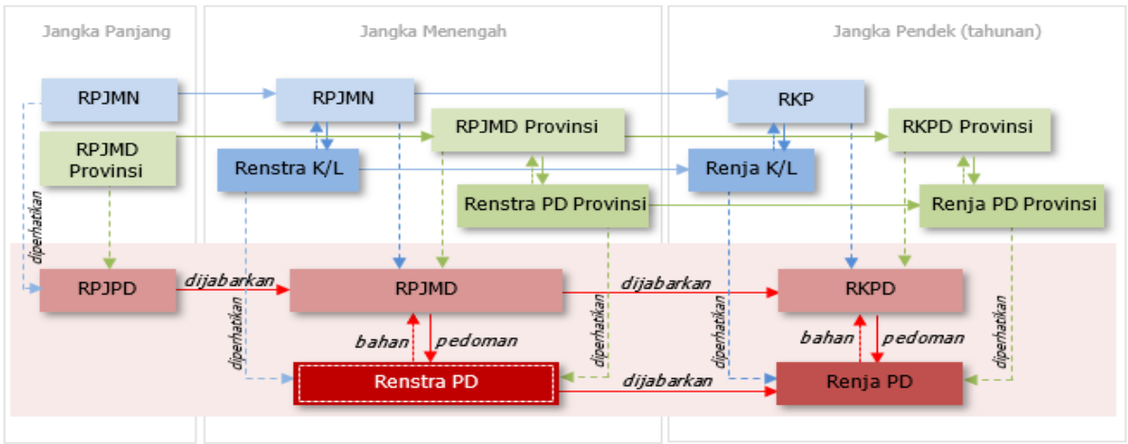

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentangPembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang
    tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1;

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
27. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah:

a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya unsur kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
c. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan

d. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

II.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT

II.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Semarang Barat bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; dimana disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Kecamatan Semarang Barat menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
i. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
k. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;

l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
m. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
n. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Barat telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a) Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan. Sekretariat terdiri atas :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

d) Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan

Sosial Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

f) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

g) Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.

h) Jabatan Fungsional
Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kelurahan

a) Lurah

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b) Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

c) Seksi Pembangunan Kelurahan

Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.

d) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.

e) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah

melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Camat Semarang Barat Kota Semarang.

Susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dapat diihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

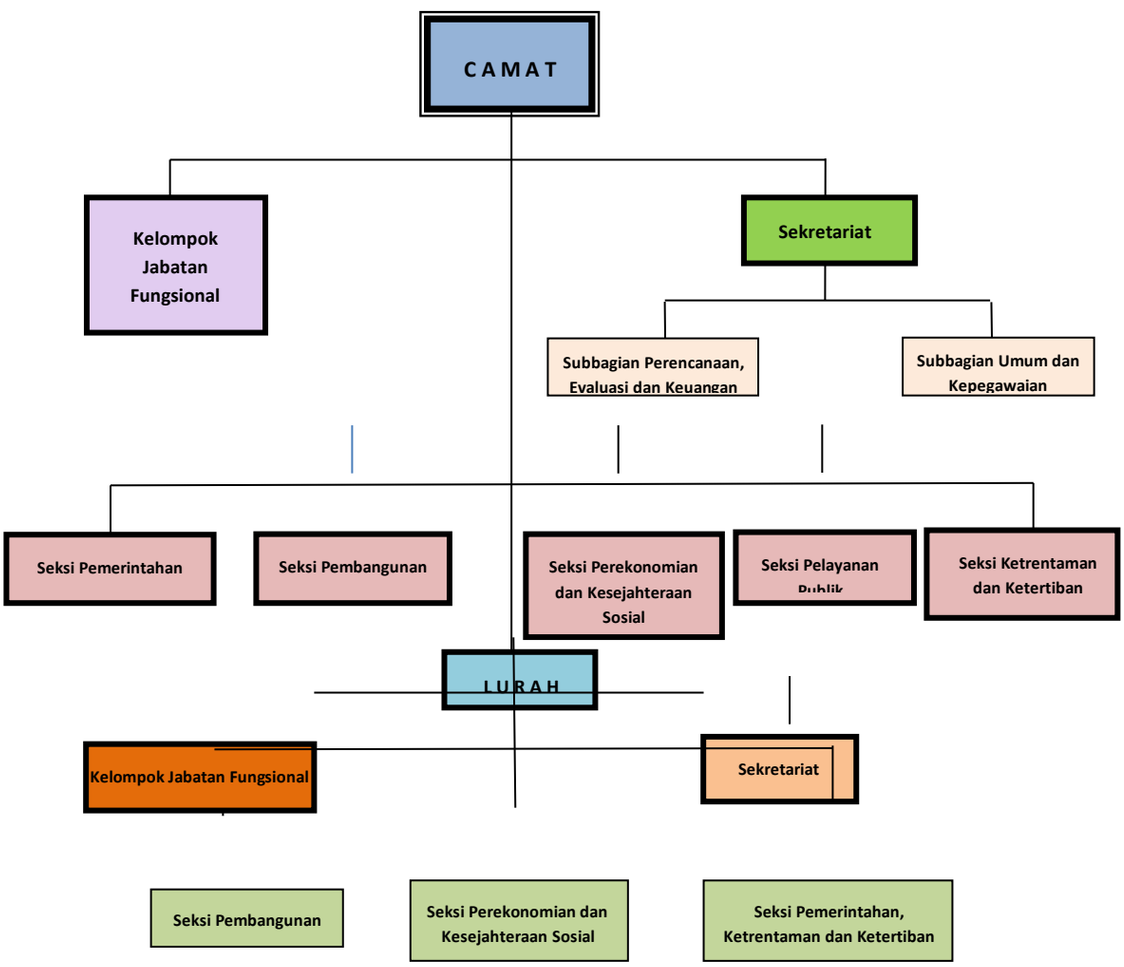

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Barat

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Semarang Barat

Adapun untuk Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Semarang Barat yaitu sebagai berikut :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

1) perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5) penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6) penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11) penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
15) penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16) penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
17) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;

18) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
19) penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Semarang Barat menyelenggarakan fungsi :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   d) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   e) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
   g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
   h) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
   b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
   d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:

a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

8) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
b) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
c) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
d) evaluasi Kelurahan.

9) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
e) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
f) Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
g) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
h) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
i) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
j) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
k) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
l) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;

m) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
n) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
o) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
p) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
b) penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
c) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
d) pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan.

11) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
a) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
b) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
c) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
d) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
e) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

13) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
b) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
c) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

14) Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;

2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
7) pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
8) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
9) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
10) pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
11) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
12) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
13) pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
14) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
15) pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
16) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
17) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
18) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
19) pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
20) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
21) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
22) pelaksanaan administrasi umum Kecamatan; pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;

23) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
24) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
25) pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
26) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
27) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
28) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
29) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
6) menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
7) menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
10) menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
11) menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
13) menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;

15) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
17) menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
20) menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
22) menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
24) menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
25) menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
26) menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
27) menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
28) menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
29) menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
30) menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
32) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
34) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
35) menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;
36) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;

37) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan; mm.menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
39) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
40) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
41) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
6) menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
9) menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
10) menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
11) menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16) menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
17) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
18) menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);
20) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

21) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
22) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
24) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
25) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
28) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
29) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
30) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
32) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
33) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
8) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
11) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);

12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
13) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
14) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia; r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
20) menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
21) menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
22) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
23) menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
24) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
25) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
26) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
27) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
28) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
29) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
30) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
31) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
32) menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;

34) menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
35) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
36) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
37) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; mm.menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
39) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
40) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
41) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
42) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik
Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
6) menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
7) menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
8) menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
11) menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
12) menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
14) menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

15) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
16) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
17) menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
18) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
19) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
20) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
21) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
22) menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
24) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
26) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
27) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;

11) menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
20) menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum; u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
21) menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
25) menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
28) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
29) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
30) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;

31) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
32) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
34) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
35) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
37) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
38) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
39) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
40) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2) pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
9) pelaksanaan kegiatan koordinasi;
10) pelaksanaan kegiatan sekretariat;
11) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
12) pelaksanaan kegiatan pembangunan;
13) pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
14) pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
15) pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
16) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
17) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
18) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
19) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
20) pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
21) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
   3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   4) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   5) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
   2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
   3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
   4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;

2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
2) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
3) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
4) evaluasi Kelurahan;

i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2) peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
3) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
4) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
5) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
6) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
7) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
8) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
9) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;

10) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
2) penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
3) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
4) Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
2) peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3) penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
4) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
5) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;

n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan

o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

II.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh Kecamatan Semarang Barat, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja Kecamatan Semarang Barat.

a. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Semarang Kota Semarang

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada Desember 2024, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 84 pegawai, dengan jumlah 42 pegawai laki – laki (50,00%) dan 42 pegawai perempuan (50,00%). Selain itu juga terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 orang (0,65%). Sedangkan pegawai yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 69 pegawai Non ASN, yang terdiri dari 58 pegawai laki-laki (84,06%) dan 11 pegawai perempuan

(15,94%). Sehingga jumlah total PNS, PPPK dan Non ASN pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebanyak 154 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk PNS Kecamatan Semarang Barat didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 dan S1 sebanyak 68 orang (80,95%), DIII sebanyak 4 orang (4,76%), lulusan SMA sebanyak 11 orang (13,10%), dan lulusan SMP sebanyak 1 orang (1,19%). Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 Orang, kemudian pegawai Non ASN terdiri dari 51 Orang lulusan SMA (73,91%) dan sisanya sebanyak 18 orang (26,09%) merupakan lulusan DIII.

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS				PPPK				NON ASN			
		L	P	Jumlah	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	L	P	Jumlah	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	L	P	Jumlah	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	**35**	**37**	**72**	**46,75**	**0**	**1**	**1**	**0,65**	**12**	**6**	**18**	**11,69**
1.	S2	7	6	13	8,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	S1	26	27	53	34,42	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	D4	1	1	2	1,30	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	D3	1	3	4	2,60	0	1	1	0,65	12	6	18	11,69
	Bukan Perguruan Tinggi	**7**	**5**	**12**	**7,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**5**	**51**	**33,12**
4.	SLTA	6	5	11	7,14	0	0	0	0	46	5	51	33,12
5.	SLTP	1	0	1	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**42**	**42**	**84**	**54,54**	**0**	**1**	**1**	**0,65**	**58**	**11**	**69**	**44,81**
Jumlah Seluruh Pegawai (PNS, PPPK & NON ASN)						**154**							

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, per Desember 2024

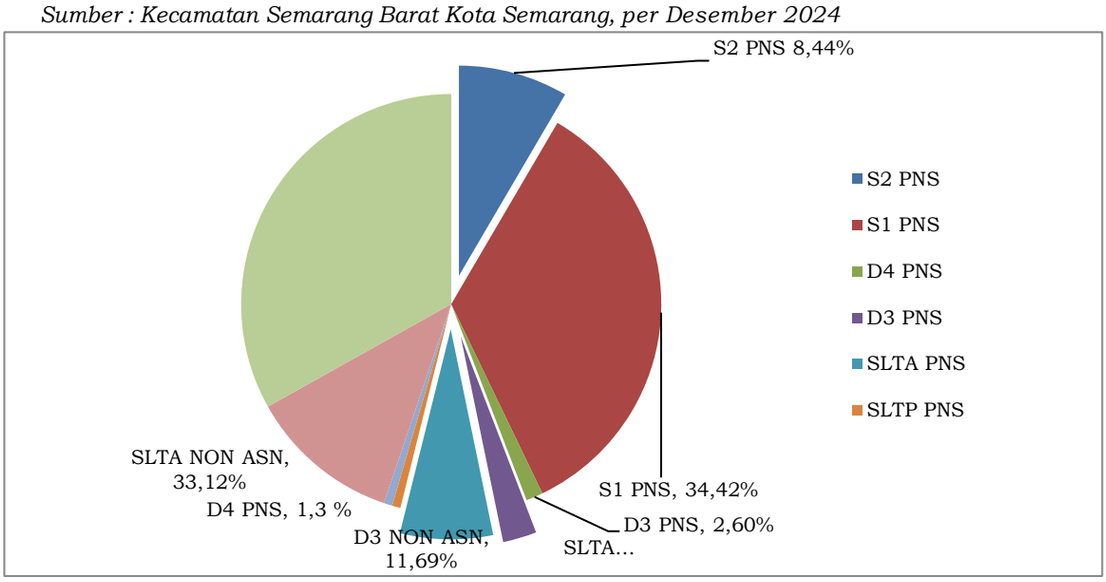

Gambar 2.2
Komposisi ASN dan Non ASN Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN Kelurahan pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah ASN dan Non ASN per unit pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kecamatan/Kelurahan	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kecamatan	3	6	1	4	34	1	0	49
2	Ngemplak Simongan	0	4	0	1	1	0	0	6
3	Manyaran	0	5	0	1	1	0	0	7
4	Krapyak	2	2	0	1	2	0	0	7
5	Tambakharjo	0	4	0	1	1	0	0	6
6	Kalibanteng Kulon	0	4	1	1	2	0	0	8
7	Kalibanteng Kidul	0	3	0	2	1	0	0	6
8	Gisikdrono	1	3	0	1	2	0	0	7
9	Bongsari	2	2	0	1	3	0	0	8
10	Bojongsalaman	1	3	0	1	1	0	0	6
11	Salamanmloyo	1	3	0	0	3	0	0	7
12	Cabean	1	3	0	1	1	0	0	6
13	Karangayu	1	2	0	1	2	0	0	6
14	Krobokan	0	2	0	1	3	0	0	6
15	Tawangsari	0	2	0	2	2	0	0	6

No	Kecamatan/Kelurahan	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
16	Tawangmas	1	2	0	2	2	0	0	7
17	Kembangarum	0	3	0	1	2	0	0	6
	Jumlah	**13**	**53**	**2**	**22**	**63**	**1**	**0**	**154**

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, per Desember 2024

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 2 pegawai (2,35%), golongan III sebanyak 77 pegawai (90,59%), golongan II sebanyak 5 pegawai (5,88%) dan golongan VII sebanyak 1 pegawai (1,18%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Pegawai			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Jumlah	
1.	**Golongan IV**			**2**	**2,35**
	IV/b	0	0	0	0,00
	IV/a	2	0	2	2,35
2.	**Golongan III**			**77**	**90,58**
	III/d	14	22	36	42,35
	III/c	15	14	29	34,12
	III/b	6	4	10	11,76
	III/a	2	0	2	2,35
3.	**Golongan II**			**5**	**5,89**
	II/d	2	2	4	4,71
	II/c	0	0	0	0,00
	II/b	0	0	0	0,00
	II/a	1	0	1	1,18
5.	**Golongan VII**			**1**	**1,18**
	VII	0	1	1	1,18
JUMLAH				**85**	**100,00**

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, per Desember 2024

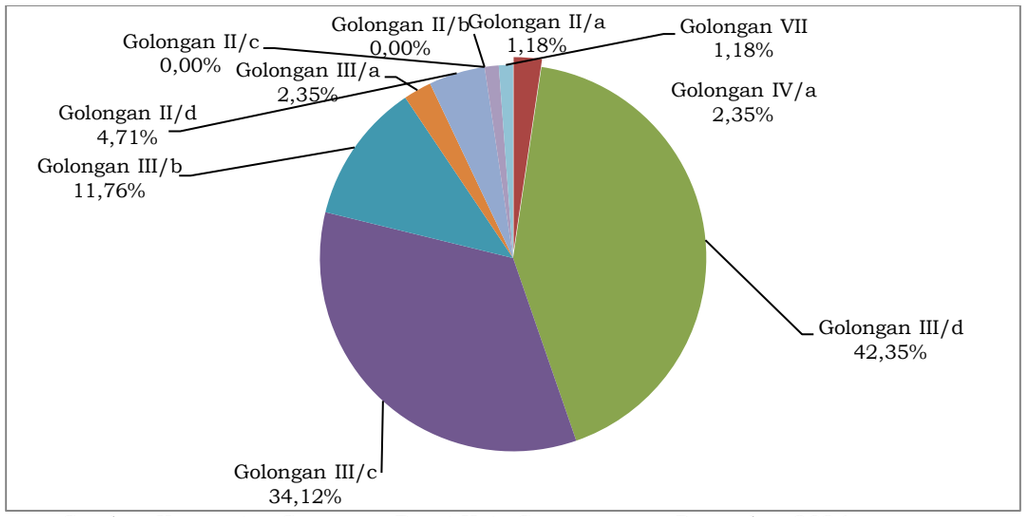

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang,per Desember 2024

Gambar 2.3
Komposisi ASN Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Golongan/Ruang

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN Kelurahan pada Kecamatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan Golongan / Ruang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah ASN per unit pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Kecamatan/Kelurahan	IV	III	II	I	VII	JUMLAH
1	Kecamatan	2	9	3	0	1	15
2	Ngemplak Simongan	0	6	0	0	0	6
3	Manyaran	0	5	0	0	0	5
4	Krapyak	0	5	0	0	0	5
5	Tambakharjo	0	4	0	0	0	4
6	Kalibanteng Kulon	0	5	0	0	0	5
7	Kalibanteng Kidul	0	4	0	0	0	4
8	Gisikdrono	0	4	0	0	0	4
9	Bongsari	0	5	0	0	0	5
10	Bojongsalaman	0	4	0	0	0	4
11	Salamanmloyo	0	5	0	0	0	5
12	Cabean	0	4	0	0	0	4
13	Karangayu	0	4	0	0	0	4
14	Krobokan	0	2	0	0	0	2
15	Tawangsari	0	4	0	0	0	4
16	Tawangmas	0	5	0	0	0	5
17	Kembangarum	0	4	0	0	0	4
	Jumlah	**2**	**79**	**3**	**0**	**1**	**85**

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang,per Desember 2024

Gambar 2.4
Komposisi ASN Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 85 ASN terdapat 2 pegawai (2,35%) yang menduduki eselon III, 73 pegawai (85,88%) yang menduduki eselon IV, 1 pegawai (1,18%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu serta 9 pegawai (10,59%) yang termasuk dalam jabatan pelaksana, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.5
Jumlah ASN Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan
Jabatan Fungsional Umum

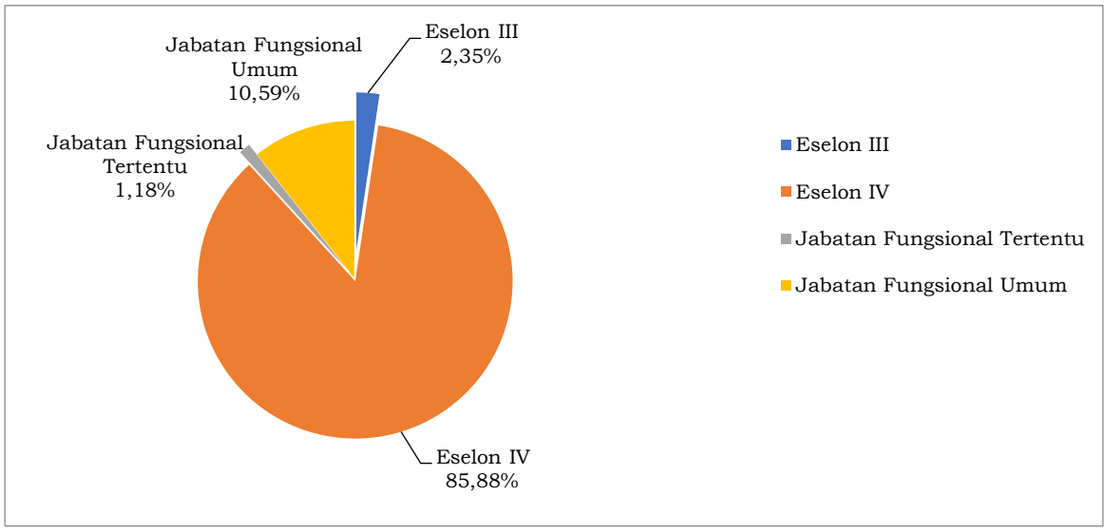

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
1	Eselon III	2	2,35
2	Eselon IV	73	85,88
3	Jabatan Fungsional Tertentu	1	1,18
4	Jabatan Pelaksana	9	10,59
	Jumlah	**85**	**100,00**

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang,per Desember 2024

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN Kelurahan pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah ASN Kelurahan pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana

No	Kecamatan/Kelurahan	III	IV	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	Jumlah
1	Kecamatan	2	7	1	5	15
2	Ngemplak Simongan	0	6	0	0	6
3	Manyaran	0	5	0	0	5
4	Krapyak	0	6	0	0	5
5	Tambakharjo	0	4	0	0	4
6	Kalibanteng Kulon	0	5	0	0	5
7	Kalibanteng Kidul	0	4	0	0	4
8	Gisikdrono	0	4	0	0	4
9	Bongsari	0	5	0	0	5
10	Bojongsalaman	0	4	0	0	4
11	Salamanmloyo	0	5	0	0	5
12	Cabean	0	4	0	0	4
13	Karangayu	0	4	0	0	4
14	Krobokan	0	2	0	0	2
15	Tawangsari	0	4	0	0	4
16	Tawangmas	0	5	0	0	5
17	Kembangarum	0	3	0	1	3
	Jumlah	**2**	**76**	**1**	**6**	**85**

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, per Desember 2024

Dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, dari 85 ASN sebanyak 21 pegawai (24,71 %) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Jumlah ASN Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024
Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah (Pegawai) yang Mengikuti	Persentase terhadap ASN (%)
1.	ADUM/ Diklat Pim IV	20	23,53
2.	SPAMA/Diklat Pim III	1	1,18
JUMLAH			**24,71**

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, per Desember 2024

a. Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Aset Tanah Kecamatan Semarang Barat

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Kaveling (dst)	132 M2		Jl. Rorojonggrang Timur III Kav 469	Hak Pakai		231		Pembelian	151.404.000	
2	Tanah Kaveling (dst)	137 M2		Jl. Rorojonggrang Timur III Kav 469	Hak Pakai		232		Pembelian	157.139.000	
3	Tanah Kaveling (dst)	149 M2		Jl. Rorojonggrang Timur III RT 12 RW 06	Hak Pakai		233		Pembelian	170.903.000	
4	Tanah Kaveling (dst)	132 M2		Jl. Rorojonggrang Timur III RT 12 RW 06	Hak Pakai		234		Pembelian	151.404.000	
5	Tanah Kaveling (dst)	138 M2		Jl. Rorojonggrang Timur RT 12 RW 06	Hak Pakai		235		Pembelian	158.286.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
6	Tanah Kaveling (dst)	147 M2		Jl. Rorojonggrang Timur RT 12 RW 06	Hak Pakai		236		Pembelian	168.609.000	
7	Tanah Kaveling (dst)	150 M2		Jl. Rorojonggrang Timur III / 474 RT 05 RW 05	Hak Pakai		237		Pembelian	172.050.000	
8	Tanah Kaveling (dst)	142 M2		Jl. Rorojonggrang Timur III RT 12 RW 06	Hak Pakai		238		Pembelian	162.874.000	
No.	**Nama Barang/ Jenis Barang**	**Luas (M²)**	**Tahun Pengadaan**	**Letak/Alamat**	**Status Tanah**			**Penggunaan**	**Asal Usul**	**Harga**	**Ket**
					Hak	**Sertifikat**					
						Tanggal	**Nomor**				
9	Tanah Bangunan Gedung Pameran	2191 M2		Semarang Indah Blok C No 21. Kel. Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai		HP 154	PSU Semarang Indah 2014	Hibah	2.757.846.800	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
10	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	600 M2		Jl. Abdulrahman Saleh Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai		HP 62	Taman	Pembelian	19.500.000	
11	Tanah Bangunan Gedung Pameran	110 M2		Jl. Pspanjolo Timur V/1.A Kelurahan Cabean	Hak Pakai	30 April 2007	HP 3	Rumah Dinas Lurah	Pembelian	123.000.000	
12	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst	2188 M2		Jl. Ronggolawe No. 2 Kelurahan Gisikdrono Semarang Barat, Semarang	Hak Pakai	18 February 1999	HP 35	Kantor Kecamatan Semarang Barat	Pembelian	1.758.178.000	
13	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	178 M2		Jl. Tambakharjo Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai	04 July 2007	HP 6	Kantor	Pembelian	74.000.000	
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	397 M2		Jl. Puspanjolo Barat Raya No. 8 Kelurahan Cabean Semarang	Hak Pakai	18 April 2007	HP 2	Kantor dan Balai Kelurahan	Pembelian	397.710.000	
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	282 M2		Jl. Wiroto Raya No.12 Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang	Hak Pakai	18 April 2007	HP 11	Kantor Kelurahan	Pembelian	295.400.000	
16	*Tanah Bangunan Kantor Pemerintah*	1048 M2		Jl. Simongan NO 200 Semarang	Hak Pakai	24 June 2005	HP 60	Balai Kelurahan Manyaran	Pembelian	30.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
17	*Tanah Bangunan Kantor Pemerintah*	1057 M2		Jl. Pamularsih No.88 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai	18 April 2007	HP 41	Kantor dan Balai Kelurahan	Pembelian	1.057.000.000	
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	366 M2		Jl. Taman Sri Rejeki No.2A Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	Hak Pakai	23 April 2007	HP 1	Kantor Kelurahan Kalibanteng Kidul	Pembelian	70.000.000	
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	797 M2		Jl. Sri Kuncoro Raya Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat	Hak Pakai	18 April 2007	HP 21	Kantor Kelurahan, Rumah Dinas dan Balai Kelurahan	Pembelian	452.200.000	
20	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300 M2		Jl. Puri Anjasmoro L XVI/14 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai			Kantor Kelurahan	Pembelian	104.950.000	
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	465 M2		Jl. Subali Raya Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai	23 April 2007	HP 49	Kantor Kelurahan	Pembelian	400.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	836		Jl. Simongan No.99 A Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	Hak Pakai	23 April 2007	HP15	Kantor dan Balai Kelurahan	Pembelian	1.505.000.000	
23	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1483 M2		Jl. Abdulrachman Saleh No. 231 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai	23 April 2007	HP 10	Kantor , Rumah Dinas dan Balai Kelurahan	Pembelian	1.275.000.000	
24	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	443 M2		Jl. Anjasmoro Raya No.18 Semarang	Hak Pakai	30 April 2007	HP 11	Kantor dan Balai Kelurahan	Pembelian	700.000.000	
25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	285 M2		Jl. Pusponjolo Barat Raya No 40	Hak Pakai	18 April 2007	HP 5	Kantor	Pembelian	627.000.000	
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	397 M2		Jl. Pusponjolo Selatan	Hak Pakai	30 April 2007	HP 8	Rumah Dinas Kelurahan	Pembelian	635.000.000	
27	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1016 M2		Jl. Pamularsih Raya Kelurahan Bongsari Semarang	Hak Pakai	18 April 2007	HP 11	Balai dan Rumdin Kelurahan	Pembelian	315.600.000	
28	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	649 M2		Jl. Sri Rejeki Utara IX Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan	Hak Pakai	30 April 2007	HP 2	Rumah Dinas dan Balai Kelurahan	Pembelian	142.690.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Semarang Barat, Kota Semarang							
29	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	300 M2		Jl. Puspowarno Raya Semarang	Hak Pakai			Balai Pertemuan II	Pembelian	61.992.600	
30	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	54 M2		Jl. Ariloka Raya Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Hak Pakai		HP13	Rumah Dinas Lurah	Pembelian	254.150.000	
31	Tanah Lapangan Badminton/Bulu tangkis	797 M2		Jalan Sri Kuncoro II Kelurahan Kalibanteng Kulon	Hak Pakai	18 April 2007		Kantor Kelurahan	Pembelian	61.200.000	
32	Tanah Lapangan Sepak Bola	10010 M2		Jl. Kenconowungu Selatan III Kel. Karangayu Semarang	Hak Pakai	27 July 2007	HP 4	Lapangan Sepak Bola	Pembelian	400.000.000	
33	Tanah Lapangan Bola Volly	1359 M2		Jl. Puspowarno Tengah III/9	Hak Pakai	05 March 2007	HP 4	Lapangan Volley	Pembelian	280.826.478	
34	Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras	1499 M2		Jalan Simongan Kelurahan Ngemplak Simongan	Hak Pakai			Tempat Parkir	Pembelian	2.006.600.000	
35	Tanah Lapangan lainnya	3559 M2		jl semarang bizpark blok a, b dan c kel tawangmas kec semarang barat	Hak Pakai	16 Desember 2021	212	parkir	Hibah	14.787.645.000	
36	Tanah Lapangan lainnya	524 M2		jl semarang bizpark blok d kel	Hak Pakai	16 Desember 2021	211	parkir	Hibah	2.177.220.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				tawangmas kec semarang barat							
37	Tanah Bangunan Bersejarah lainnya	94 M2		Jl. Tawang Aglik Lor Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	Hak Pakai	31 July 2007	HP 12	Balai RW VI	Pembelian	42.000.000	
38	Tanah Untuk Makam Umum	1400 M2		Jl. Tawang Aglik Lor Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat	Hak Pakai	29 Novembe r 2010	HP 19	Makam	Pembelian	1.500.000.000	
39	Tanah Lapangan Taman lainnya	600 M2		Jl. Taman Gedung Batu Semarang	Hak Pakai			Taman	Pembelian	1.350.000.000	
40	Tanah Lapangan Taman lainnya	1519 M2		Jalan Simongan Kelurahan Ngemplak Simongan	Hak Pakai		HP 13	Taman Simongan	Pembelian	2.185.000.000	
41	Tanah Lapangan Taman lainnya	283 M2		Jl. Taman Anjasmoro VI Kelurahan Karangayu	Hak Pakai	30 April 2007	HP 10	taman	Pembelian	200.000.000	
42	tanah kampung lainnya (dst)	256 M2		Jl. Puspanjolo Selatan Kelurahan Bojong Salaman Semarang	Hak Pakai	30 April 2007	6	Taman	Pembelian	100.000.000	
43	tanah kampung lainnya (dst)	303 M2		Jl. Tawang Rejosari No 26 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan	Hak Pakai	18 April 2007	HP 11	Kantor	Pembelian	120.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Semarang Barat, Kota Semarang							
44	tanah kampung lainnya (dst)	5745 M2		Jl. Tambakharjo Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat	Hak Pakai	04 July 2007	HP 5	Tanah	Pembelian	560.000.000	
45	tanah kampung lainnya (dst)	1150 M2		Jl. Simongan Semarang (dekat pleret)	Hak Pakai	18 April 2007	HP 13	Tanah Kosong	Pembelian	250.000.000	
46	tanah kampung lainnya (dst)	1400 M2		Semarang Indah Blok C XXI No 1 Kel. Tawangmas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang	Hak Pakai	15 Desember 2003	HP 9	Tanah	Pembelian	1.400.000.000	
47	tanah kampung lainnya (dst)	445 M2		Jl. Tm Anjsmoro II - III Kel. Karangayu Semarang	Hak Pakai	30 April 2007	HP 6	Taman	Pembelian	400.000.000	
48	tanah kampung lainnya (dst)	470 M2		Jl. Tm Anjasmoro III - IV kel. Karangayu Semarang	Hak Pakai	30 April 2007	HP 7	Taman	Pembelian	200.000.000	
49	tanah kampung lainnya (dst)	382 M2		Jl. Puspanjolo Tengah II Kelurahan Cabean Semarang	Hak Pakai	30 April 2007	HP 4	Tanah untuk lapangan	Pembelian	382.300.000	
50	tanah kampung lainnya (dst)	465 M2		Jl. Taman Anjasmoro IV-V	Hak Pakai	30 April 2007	HP 8	Taman	Pembelian	400.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Kelurahan Karangayu							
51	tanah kampung lainnya (dst)	282 M2		Jl. Taman Anjasmoro V-VI Kelurahan Karangayu	Hak Pakai	30 April 2007	HP 9	Taman	Pembelian	400.000.000	

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Tabel 2.9
Gedung dan Bangunan Kecamatan Semarang Barat

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Tengah III, Kel. Salamanmloyo	518,5 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	1.077.510.028
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. Kalibanteng	124 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	461.982.432
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat	100 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	58.957.000
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Rt.01/02 Kelurahan Krobokan, Kec. Semarang Barat	196.73 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	100.000.000
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		jl semarang bizpark blok d kel tawangmas kec semarang barat	524 M2	Pemerintah Kota Semarang	Hibah	193.880.000
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		jl semarang bizpark blok a,b,c kel tawangmas kec semarang barat	3559 M2	Pemerintah Kota Semarang	Hibah	1.227.855.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl Kenconowungu Selatan II		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	1.499.328.260
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Candi Pawon Timur	152 M2	Pemerintah Kota Semarang	Hibah	142.803.000
9	Tugu/Tanda Batas	Baik		Jl Srinindito VII		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	161.605.670
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl Srinindito VII		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	37.392.577
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Candi Pawon Timur XIII RT.09 RW.VII	24.95 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	28.543.850
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Candi Pawon Timur XIII RT.09 RW.VII	17.8 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	46.747.363
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kantor Kelurahan Manyaran	37.95 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	308.761.777
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Borobudur Utara Raya RW 3		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	170.490.000
15	Tugu/Tanda Batas	Baik		Jl. Rorojonggrang Timur RT 12 RW 06	132 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	21.780.000
16	Tugu/Tanda Batas	Baik		Jl. Rorojonggrang Timur III Kav 469	137 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	22.605.000
17	Tugu/Tanda Batas	Baik		Jl. Rorojonggrang Timur III RT 12 RW 06	149 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	24.585.000
18	Tugu/Tanda Batas	Baik		Jl. Rorojonggrang Timur III RT 12 RW 06	132 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	21.780.000
19	Tugu/Tanda Batas	Baik		Jl. Rorojonggrang Timur RT 12 RW 06	138 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	22.770.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
20	Tugu/Tanda Batas	Baik		Jl. Rorojonggrang Timur RT 12 RW 06	147 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	24.225.000
21	Tugu/Tanda Batas	Baik		Jl. Rorojonggrang Timur III / 474 RT 05 RW 05	150 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	24.750.000
22	Tugu/Tanda Batas	Baik		Jl. Rorojonggrang Timur III RT 12 RW 06	142 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	23.430.000
23	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Warigalit Raya	349 M2	Pemerintah Kota Semarang	Hibah	196.771.000
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kampung Tematik Kel. Kembangarum	63.35 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	46.257.208
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kampung Tematik Kel. Kembangarum	36 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	12.105.700
26	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kampung Tematik Kel. Kembangarum	25.46 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	23.649.650
27	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kampung Tematik Kel. Kembangarum	25.56 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	24.586.629
28	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JALAN WOLOGITO RT.001 RW.001		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	120.050.000
29	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JALAN BOROBUDUR TIMUR X RT.006 RW.009		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	120.350.000
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Taman Borobudur Timur XI RT 6 RW 10		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	72.949.367
31	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kampung Tematik Kel. Tambakharjo	107.64 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	112.896.219
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kampung Tematik Kel. Tambakharjo	60 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	17.062.731

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
33	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kampung Tematik Kel. Tambakharjo	10 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	10.499.267
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		kel tambakharjo		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	68.833.576
35	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kel. Tambakharjo		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	130.023.246
36	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Tambakharjo Semarang	450 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	189.500.000
37	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jalan Muradi I RT 4 RW 6 Kelurahan Kalibanteng Kulon	30 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	44.214.091
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jalan Lebdosari IX Rt 8 Rw 5 Kelurahan Kalibanteng Kulon	35 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	27.241.298
39	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Taman Jembawan RT 2 RW 1 Kelurahan Kalibanteng Kulon	31 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	25.330.150
40	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jalan Jembawan Rw 01 Kelurahan Kalibanteng Kulon	31 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	49.443.000
41	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		pos tematik kel kalibanteng kulon		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	12.412.236
42	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		taman kmpung tematik kel kalibanteng kulon		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	39.641.882
43	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. SRIKUNCORO RT 9 RW 3 KALIBANTENG KULON		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	68.300.000
44	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. LEBDOSARI IX RT 6 RW 5 KALIBANTENG KULON		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	226.889.000
45	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Cakrawala Raya RT 3 RW 8 Kelurahan Gisikdrono	49 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	59.384.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
46	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Jendral Sudirman RT 2 RW 3 Kelurahan Gisikdrono	41 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	23.414.852
47	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Kumudasmoro Selatan RT 1 RW 5 Kelurahan Gisikdrono		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	70.653.147
48	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Mintojiwo Timur Rt 1 Rw 7 Kelurahan Gisikdrono	49 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	59.654.000
49	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. TARUPOLO TENGAH RT.09 RW.10 GISIKDRONO		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	74.250.000
50	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		taman kampung tematik kel bojong salaman		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	25.412.719
51	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		pos di kampung teamtik kel bojong salaman		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	74.694.030
52	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		taman kampung tematik kel bojong salaman		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	83.587.054
53	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. PAMULARSIH III RT 01 RW 08		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	95.750.000
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Pamularsih V RT 03 RW 07		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	94.700.000
55	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Tengah Raya RW 2 Kelurahan Salaman Mloyo	41 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	48.621.906
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Selatan RW 6 Kelurahan Salaman Mloyo		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	35.606.093
57	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Selatan RT.03 RW.VI	5.12 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	24.089.363

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
58	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Selatan RT.03 RW.VI	36.22 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	174.463.084
59	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. PUSPOWARNO SELATAN RT00 RW05 SALAMAN MLOYO		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	52.100.000
60	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jalan Simongan Rt. 03/ Rt. 05 RW 02 Kelurahan Bongsari		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	99.614.000
61	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jalan Kumudasmoro Tengah RT.01 RW. 04 Pembatas Rw.08 Kelurahan Bongsari.	37 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	41.605.211
62	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jalan Dr Ismangil RT 4 RW 4 Kelurahan Bongsari	40 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	41.605.788
63	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. CONDROKUSUMO RT 02 RW 03 KELURAHAN BONGSARI		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	51.800.000
64	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Karangsawo RT 7 RW 2	103 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	82.334.415
65	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Raya RW 3 Kelurahan Cabean	30 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	34.739.507
66	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Pusponjolo Tengah RW 1 Kelurahan Cabean	30 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	34.740.492
67	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kel. Cabean		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	182.271.481
68	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kel. Cabean		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	16.473.139
69	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. PUSPANJOLO BARAT RAYA RT 01 RW 03		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	75.080.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
70	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Kenconowungu II RT 1 RW 1 Kelurahan Karangayu	39 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	35.658.835
71	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Kenconowungu II Rt 3 Rw 2 Kelurahan Karangayu	39 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	33.476.164
72	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kel. Karangayu		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	74.317.766
73	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kel. Karangayu		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	124.611.590
74	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kelurahan Karangayu	6106 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	823.752.635
75	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kelurahan Karangayu	12.5 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	96.953.685
76	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kelurahan Salaman Mloyo	286 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	77.674.990
77	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		kel tawangmas		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	21.412.803
78	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		kel tawangmas		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	55.098.586
79	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Tawang Aglik Lor Semarang	94 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	146.314.000
80	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Dworowati Raya RT.08 RW.09	14.72 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	42.689.284
81	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Dworowati Raya RT.08 RW.09	59.4 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	38.385.961
82	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl Jodipati Kelurahan Krobokan, Semarang Barat		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	1.172.980.688

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
83	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL JODIPATI RW 12 KELURAHAN KROBOKAN		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	88.300.000
84	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Perum Semarang Indah Blok A RW 05 Kelurahan Tawangsari		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	69.569.000
85	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Cakrawala Tengah RT 6 RW 3 Kelurahan Tawangsari		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	31.130.287
86	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Perum Semarang Indah Blok A RW 5 Kelurahan Tawangsari		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	55.270.712
87	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		jl cakrawala tengah II		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	35.069.900
88	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		jl cakrawala III		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	30.184.016
89	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		kel tawangsari		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	97.395.027
90	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		taman kmapung tematik kel tawangsari		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	36.783.787
91	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. SEMARANG INDAH BLOK A RT1RW5 TAWANGSARI		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	115.600.000
92	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Cakrawala Tengah III RT 05 RW 03		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	94.631.000
93	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Taman Sri REjeki Rt 7 Rw 2 Kelurahan Kalibanteng Kidul	66 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	74.653.000
94	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kel. Kalibanteng Kidul		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	121.587.827
95	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kel. Kalibanteng Kidul		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	50.399.347

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
96	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kel. Kalibanteng Kidul		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	25.015.044
97	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		JL. TAMAN SRI REJEKI RT 7 RW 2 KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL		Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	129.050.000
98	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Ronggolawe No. 2 Semarag	2000 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	2.374.274.567
99	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl.Ronggolawe No. 2 Semarang	4 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	45.000.000
100	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl.Ronggolawe No. 2 Semarang	2000 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	2.461.742.102
101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Simongan Semarang	400 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	714.000.000
102	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Kantor Kec. semarang Barat Jl. Ronggolawe No. 2 Smg	30 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	21.956.000
103	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Simongan No. 99. A	50 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	60.000.000
104	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Simongan No. 99. A Semarang	387 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	576.559.267
105	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Subali Raya Semarang	400 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	138.575.885
106	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Pamularsih Raya Semarang	1000 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	631.080.224
107	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Taman Sri Rejeki No.2 A Semarang	200 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	483.553.769

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
108	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Tambakharjo Semarang	170 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	1.633.077.494
109	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Pamularsih BaratNo.40 Semarang	250 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	678.659.677
110	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Sri Kuncoro Raya Semarang	790 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	737.903.776
111	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Simongan Semarang	1000 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	544.249.921
112	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspanjolo Barat Raya N0.8 Semarang	390 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	695.488.482
113	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Pamularsih Raya No. 88 Semarang.	1050 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	573.199.923
114	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Simongan Semarang	400 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	903.600.000
115	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Ariloka Raya Semarang	314.18 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	682.620.439
116	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puri Anjasmoro L 16/14 Semarang	1000 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	505.008.586
117	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Anjasmoro Raya No. 18 Semarng	390 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	278.486.058
118	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl.Simongan No. 99. A	387 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	539.035.636
119	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Subali Raya Semarang	458 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	224.064.731
120	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Abdulrachman Saleh Semarang	1400 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	1.154.083.031

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
121	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Tengah III/9 Semarang	500 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	231.690.800
122	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Semarang Indah Blok C 11 Semarang	670 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	366.020.000
123	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Semarang Indah Blok C.11 Semarng	400 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	760.000.000
124	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Sri Rejeki Utara IX Semarang	326 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	675.127.553
125	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Pamularih Raya Semarang	1000 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	279.573.789
126	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Anjasmoro Raya No.18 Semarang	100 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	238.019.000
127	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Tengah III/9 Semarang	1000 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	500.895.000
128	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Raya Semarang	1000 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	134.400.000
129	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspanjolo Selatan Semarang Barat	390 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	261.855.561
130	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Sri Rejeki Utara IX Semarang	45 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	69.880.000
131	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Ariloka Raya Semarang Barat	875 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	45.000.000
132	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Abdulrachman Saleh Semarang	1400 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	54.400.000
133	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Pamularsih Semarang	58 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	54.000.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
134	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Anjasmoro Raya No.18 Semarang	400 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	45.000.000
135	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Semarang Indah Blok C.11	150 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	67.200.000
136	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Tambakharjo Semarang	36 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	54.400.000
137	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Pamularsih No.88 Semarang	80 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	45.000.000
138	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Pamularsih No.88 Semarang	1050 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	429.824.137
139	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. Puspowarno Tengah V/1 RT 3 RW 2 SALAMAN MLOYO	135 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	54.000.000
140	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik		Jl. PuspanjoloTimur V/1A Semarang	61 M2	Pemerintah Kota Semarang	Pembelian	99.500.000

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

II.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat mencakup capaian kinerja, anggaran dan realisasi pendanaan, kemitraan perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, berbagai inovasi pelayanan, serta penghargaan yang diperoleh selama 2021-2025.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Pada dokumen Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Kecamatan Semarang Barat di bidang kewilayahan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
1.	**Indikator Tujuan :**																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	87,00	87,00	87,00	88,00	89,00	87,00	87,00	91,00	92,33	94,23	100,00%	100,00%	104,60%	104,92%	101,32%
2.	**Indikator Sasaran :**																		
a.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	-	-	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
b.	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	-	-	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
c.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	-	-	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
d.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	-	N/A	17,00%	17,00%	20,00%	86,72%	N/A	17,00%	17,00%	20,00%	86,72%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
e.	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	-	N/A	17,00%	17,00%	20,00%	86,72%	N/A	17,00%	17,00%	20,00%	86,72%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	-	-	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
3.	**Indikator Program :**		-	-															
a.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
b.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
c.	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
d.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persen	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
e.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
g.	Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	Persen	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
h.	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	Persen	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
i.	Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan RT	Persen	-	-	88,00%	-	-	-	-	88,00%	-	-	-	-	88,00%	-	-	-	-
j.	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh	Aset	-	-	28 Aset	-	-	-	-	28 Aset	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan																		
k.	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	Keluraha	-	-	13 Kelurahan	-	-	-	-	13 Kelurahan	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
l.	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan Kelurahan)	Kegiatan	-	-	1.640 Kegiatan	-	-	-	-	1.640 Kegiatan	-	-	-	-	100,00%	92,43%	-	-	-
m.	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	Persen	-	-	53,00%	-	-	-	-	53,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
n.	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	Persen	-	-	98,87%	-	-	-	-	98,87%	-	-	-	-	98.87%	-	-	-	-
o.	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	Persen	-	-	99,04%	-	-	-	-	99,04%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
p.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar PATEN	Persen	-	-	77% / 6 Kelurahan	-	-	-	-	77% / 6 Kelurahan	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
q.	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	Pelayanan	-	-	40.665 Pelayanan	-	-	-	-	40.665 Pelayanan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
r.	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	Kelurahan	-	-	16 Kelurahan	-	-	-	-	16 Kelurahan	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
s.	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
t.	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan	Persen	-	-	94,31%	-	-	-	-	94,31%	-	-	-	-	94,31%	-	-	-	-
u.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persen	-	-	-	85,00%	91,00%	92,00%	93,00%	-	85,00%	91,00%	92,00%	94,23%	-	100,00%	100,00%	100,00%	101,32%
v.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	-	-	-	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	-	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
w.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	-	-	0,00%	10,00%	15,00%	86,72%	-	0,00%	10,00%	15,00%	86,72%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
x.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen	-	-	-	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	dan Ketahanan Nasional																		
4.	**Indikator Lainnya**		-	-															
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	-	-	N/A	83,47%	-	-	-	N/A	83,47%	-	-	-	N/A	100,00%	-	-	-
b.	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persen	-	-	-	-	11,14 %	10,52%	9,9%	-	-	5,89%	5,89%	7,42%	-	-	189,13%	178,61%	133,42%
c.	Nilai AKIP	Angka	-	-	N/A	71,87	75,70	79,24	83,20	N/A	71,87	75,70	79,24	75,75	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	91,04%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yaitu membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagramberikut:

Tabel 2.11
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	87,00	91,00	92,33	94,23

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

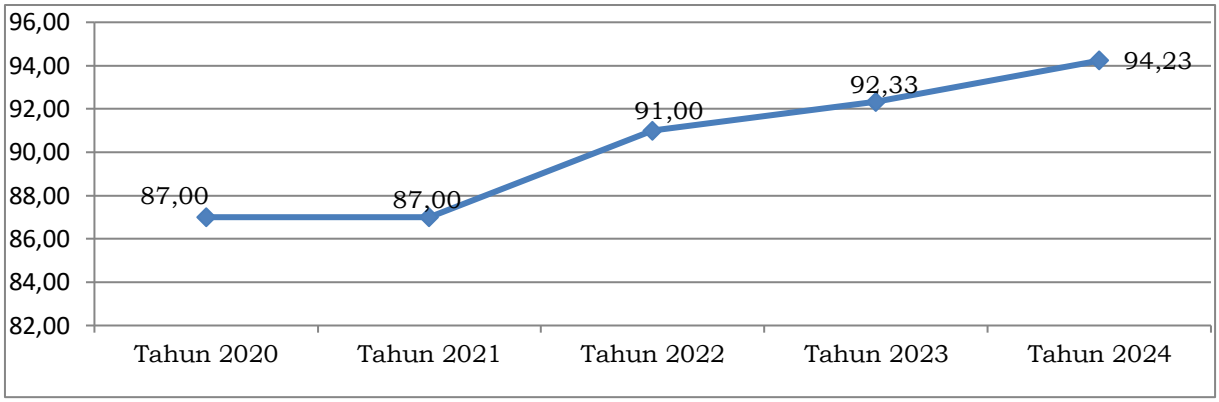

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Gambar 2.5
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

Selain dari Indeks Kepuasan Masyarakat, kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat juga dilihat dari Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif,

Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.12
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

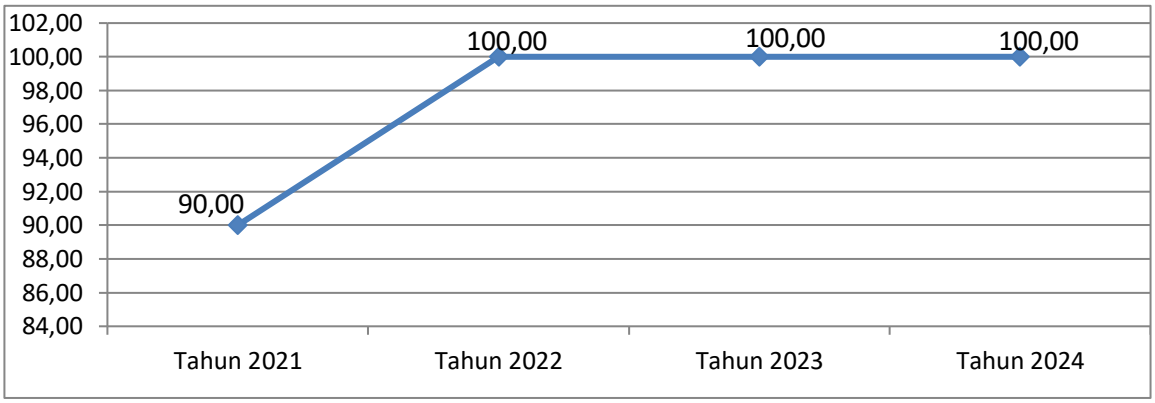

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Gambar 2.6
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020-2024

Sedangkan untuk Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.13
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

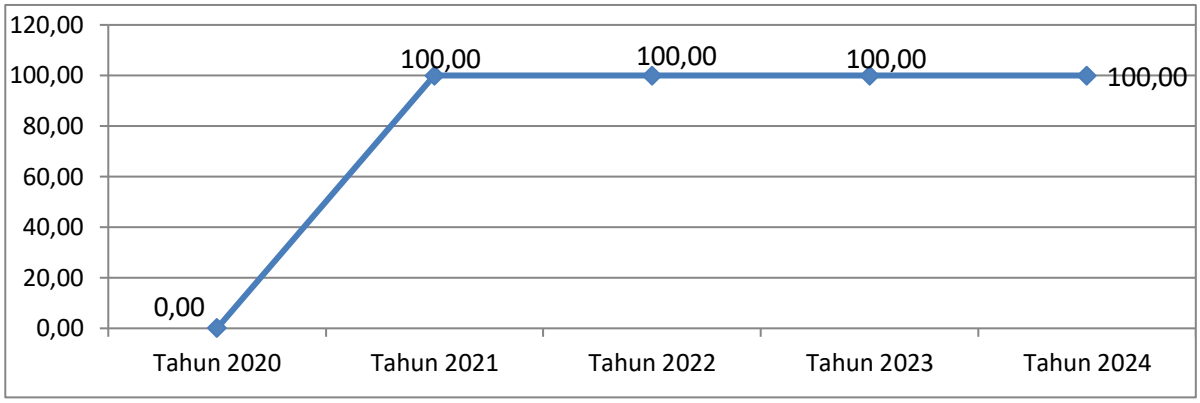

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Gambar 2.7
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.14
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum	N/A	17,00%	17,00%	20,00%	86,72%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Gambar 2.8
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

Sedangkan untuk Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.15
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

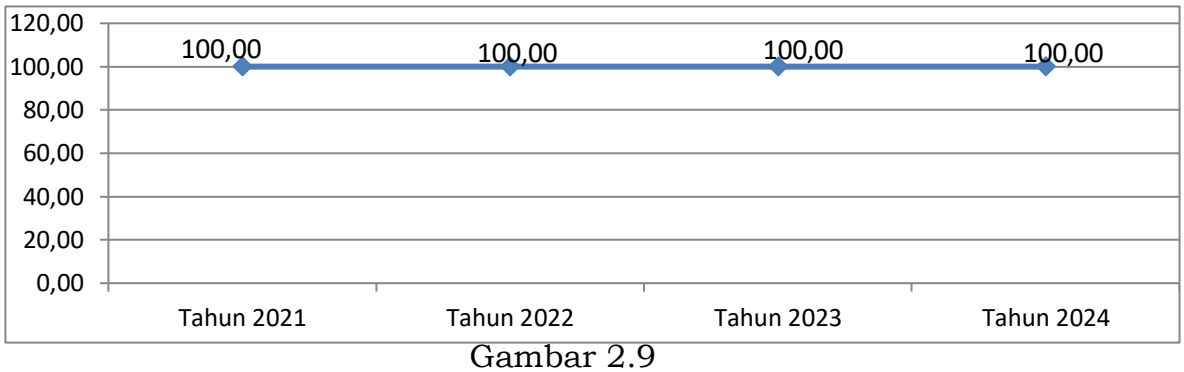

Gambar 2.9
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2020-2024 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang menerima total alokasi anggaran sebesar Rp 227.836.954.337,- dengan realisasi sebesar Rp 219.737.154.977,- (96,44%). Secara rinci anggaran beserta realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaksanaan Urusan
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	JUMLAH BELANJA	**26.336.472.000**	**58.388.999.975**	**53.887.081.940**	**62.984.119.168**	**26.240.281.254**	**25.612.163.547**	**55.356.396.119**	**52.647.270.471**	**61.292.580.617**	**24.828.744.223**	**97.25**	**94.81**	**97.70**	**97.31**	**94.62**	**18,13**	**17.04**
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.195.120.000	0	0	0	0	1.195.062.800	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	500.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	41.800.000	0	0	0	0	39.101.000	0	0	0	0	93,54	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	6.472.087.051	0	0	0	0	6.043.426.787	0	0	0	0	93,38	0	0	0	0	0	0
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.173.077.449	0	0	0	0	17.882.679.863	0	0	0	0	98,40	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	198.285.000	0	0	0	0	196.296.097	0	0	0	0	99,00	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	221.600.000	0	0	0	0	221.597.500	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	33.632.500	0	0	0	0	33.379.500	0	0	0	0	99,25	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Intensifikasi PAD	370.000	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	16.428.717.615	17.279.531.038	19.176.029.125	20.974.825.871	0	15.855.864.184	17.005.032.590	18.400.902.385	19.609.596.417	0	95,51	98,41	95,96	93,49	8,51	7,34
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	17.990.408.889	4.219.596.951	4.200.423.998	3.571.789.113	0	16.502.289.059	3.983.056.664	4.058.348.277	3.555.817.176	0	91,73	94,39	96,62	99,55	30,66	28,79
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	23.908.557.563	32.358.416.271	39.509.390.062	1.605.376.170	0	22.937.437.876	31.632.236.217	38.735.279.955	1.575.135.630	0	95,94	97,76	98,04	98,12	12,83	11,86
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	61.315.908	14.553.840	14.232.061	14.041.500	0	60.805.000	12.220.000	14.100.000	13.970.000	0	99,17	83,96	99,07	99,49	26,60	21,81

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	14.983.840	84.043.922	74.248.600	0	0	14.725.000	83.950.000	74.225.000	0	0	98,27	99,89	99,97	273,58	283,85

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

c. Mitra Kecamatan Semarang Barat dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Semarang Barat menjalin kemitraan strategis dengan berbagai unsur pelaksana pelayanan yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- Kelurahan, sebagai ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan program pelayanan dasar.
- Koramil, yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
- Polsek, sebagai mitra dalam penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan koordinasi keamanan lingkungan.
- Puskesmas, sebagai penyedia layanan kesehatan primer yang mendukung pencapaian indikator kesehatan masyarakat.
- KORLAP UP2AKBPA, yang berperan dalam pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, serta peningkatan kualitas hidup keluarga.
- Masyarakat, sebagai subjek dan objek pelayanan yang dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- KUA, sebagai mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, pembinaan keluarga sakinah, dan pencatatan pernikahan.
- UPTD Pendidikan, yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui koordinasi program pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan.

d. Inovasi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Terkait pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. “SEMARANG PRO KETAN” (Semarang Barat Pelayanan Ramah Kelompok Rentan)

   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Semarang Barat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan public wajib dilaksanakan. Pelayanan Publik berasaskan persamaan hak, persamaan perlakuan dan penyediaan fasilitas standar pelayanan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan diantaranya Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil, Anak-anak, Perempuan, Orang Lanjut Usia (Lansia) dan Kelompok Fakir Miskin.

2. “JUM’AT MABAR” (Jum’at Makan Bareng, Semarang Barat Berbagi Barokah)

   Jumat Mabar Semangat Berkah adalah salah satu kegiatan makan bareng berbagi masakan yang di racik dan di masak sendiri oleh pegawai Kecamatan Semarang Barat bersama lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan sponsorship. Dilaksanakan pada hari Jumat, di bagikan oleh semua warga dan semua kalangan tidak hanya yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Barat saja. Pelaksanaan Jumat berkah terpadu di seluruh Kelurahan seKecamatan Semarang Barat bersinergitas antar Kelurahan dengan kelembagaan ditingkat Kelurahan sampai RT

dan RW, Keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat secara aktif dan berkala. Mengutamakan kemanfaatan yang berkelanjutan. Bekerjasama dengan para pengusaha yang ada di masing-masing Wilayah Kelurahan.

3. “KARTU LANSIA”
   Inovasi Kecamatan Semarang Barat berupa Kartu Lansia yaitu sebuah terobosan Identitas Warga Lansia di wilayah Kecamatan Semarang Barat berwujud Kartu, memiliki fungsi kemudahan bagi warga lansia di wilayah Kecamatan Semarang Barat untuk mendapatkan pelayanan, pemilik Kartu Lansia adalah warga di wilayah Kecamatan Semarang Barat yang berusia minimal 60 tahun dan sudah terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mendapat Fasilitas Konseling di Kecamatan Semarang Barat, dan pemberian potongan harga untuk produk UMKM yang ada di Wilayah Kecamatan Semarang Barat.

4. “KALIMAT SAKTI” (KAder LakI-laki horMAT dan Sayang anaK isTrI)
   Sebuah gerakan keteladanan seorang laki-laki dalam perannya sebagai Bapak, Suami dan Pria yang menghormati serta peduli terhadap perempuan dan anak, Pilot project dilaksanakan di tiga Kelurahan Manyaran, Karangayu dan Gisikrono.

5. “SEMAR DELIMA” (Semarang Barat Delivery Akta Kematian)
   Merupakan salah satu bentuk inovasi Kecamatan Semarang Barat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan Surat Edaran Camat Tentang Pemberitahuan Layanan Akta Kematian Nomor : B/266/800/IV/2023, tanggal 27 April 2023, yang bertujuan untuk Delivery Akta Kematian kepada warga pemohon oleh Tim Delivery Service Kecamatan Semarang Barat.

6. “SEMAR ASIK” (Semarang Barat Ahad Resik)
   Dalam rangka konsep bergerak bersama untuk mewujudkan Semarang Semakin Hebat serta peningkatan kesadaran akan kerapian dan kebersihan lingkungan di masing-masing wilayah yang bertujuan untuk perawatan, pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan.

7. “SEMAR IDOL” (Semarang Barat Idol)
   Merupakan program ajang pencarian bakat yang bertujuan untuk menciptakan image Kecamatan yang keren dan inovatif serta sebagai sarana komunikasi antar warga masyarakat dengan Pemerintah Kecamatan Semarang Barat tanpa batas ruang tertentu melalui seni olah vocal.

e. Penghargaan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kecamatan Semarang Barat berhasil memperoleh penghargaan yang diakui di berbagai tingkat, antara lain:

1. Juara 1 Kecamatan Layak Anak Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
2. Juara 1 Lomba Video Drainsae Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
3. Juara 1 Lomba Video Tiktok Kemanan Pangan Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
4. Juara Umum Lomba Nasi Goreng Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
5. Juara Harapan 2 Mars PKK Pria Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
6. Juara 1 Lomba Fashion Show TP PKK Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
7. Juara 2 Tournament Sepak Bola Libas Cup Tahun 2023;
8. Juara 1 Lomba Catur Porwakos Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
9. Juara 3 Lomba Tenis Meja Porwakos Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
10. Penghargaan Pilot Project Percontohan Nasional Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Kategori Siaga Kebakaran Lingkungan Tahun 2024;
11. Juara 1 Nasional Lomba Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana Kebakaran Tahun 2024;
12. Juara 1 Camat Berkinerja Terbaik Tahun 2024;
13. Juara 2 Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2024;
14. Juara 2 ASN Award Inovatif Tahun 2024;
15. Juara 1 Paduan Suara Lansia Tahun 2024;
16. Juara 2 Lomba Festival Flowers Tahun 2024;
17. Juara Harapan 2 Gerak Kreasi Perempuan Anti Korupsi Tahun 2024;
18. Juara Harapan 3 Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tahun 2024.

II.1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Semarang Barat sebagai berikut:

1. Belum optimalnya struktur dan kapasitas kelembagaan, yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar unit kerja.
2. Kualitas pelayanan publik yang belum konsisten, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat.
3. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses pelayanan dan monitoring belum sepenuhnya digital dan efisien.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, yang menyebabkan rendahnya dampak pembangunan berbasis komunitas.
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang mempengaruhi pelaksanaan program secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Semarang Barat untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah :

1. Dukungan kebijakan pemerintah kota dan nasional terhadap penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
2. Kemajuan teknologi digital, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi pengelolaan data.
3. Potensi kolaborasi lintas sektor, baik dengan OPD lain, lembaga masyarakat, maupun perguruan tinggi untuk inovasi pelayanan dan pemberdayaan.
4. Semangat reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja, yang mendorong perbaikan sistem dan budaya kerja.
5. Ketersediaan SDM yang berdedikasi dan terbuka terhadap pengembangan kapasitas, sebagai modal penting dalam transformasi pelayanan.

II.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SEMARANG BARAT

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

II.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Semarang Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hasil evaluasi capaian kinerja dan analisis kondisi wilayah menunjukkan masih adanya permasalahan utama, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan utama tersebut diuraikan lebih lanjut dalam bentuk permasalahan dan akar masalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.17
Rumusan Permasalahan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2025 – 2029

No	PERMASALAHAN OPD	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Barat	Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Barat
		Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Barat
		Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Barat
2	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Barat	Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Barat
		Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat
		Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Barat
		Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Barat
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Barat
3	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat
		belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Barat
		Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat
		Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Barat

Sumber: Kecamatan Semarang Barat 2025

Selain itu masalah umum yang terjadi di Kecamatan Semarang Barat adalah sebagaimana berikut :

1. Kondisi jalan yang masih banyak yang rusak baik jalan provinsi maupun jalan kota.
2. Masih terdapat 3 kelurahan yang tidak memiliki trayek transportasi darat tetap, yakni Kelurahan Tambakharjo, Krobokan dan Tawangmas.
3. Terbatasnya jumlah pasar yang tersedia, hanya 8 kelurahan yang mempunyai pasar tradisional.

4. Masih terdapat balita stunting.
5. Terbatasnya fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas.
6. Kondisi geografis menyebabkan sering terjadinya bencana longsor, banjir dan pohon tumbang terutama pada musim penghujan.

II.2.2 TELAAHAN DOKUMEN LAINNYA

A. TELAAHAN RPJMN 2025 – 2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen,

indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

A. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif.”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

1) **Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif,** dirumuskan tujuan sebagai berikut:
   - Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing.
   - Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat.
   - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
   - Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.

2). **Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif,** dirumuskan tujuan Menurunnya kemiskinan secara inklusif.
3). **Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif,** dirumuskan tujuan Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat.
4). **Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif,** dirumuskan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang.

Misi 2 Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat.

Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Barat mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif”** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.”**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat” (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Semarang Barat mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat” (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran “Indeks Pelayanan Publik” (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran “meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang” (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran “Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah" (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Semarang Barat secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Semarang Barat dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

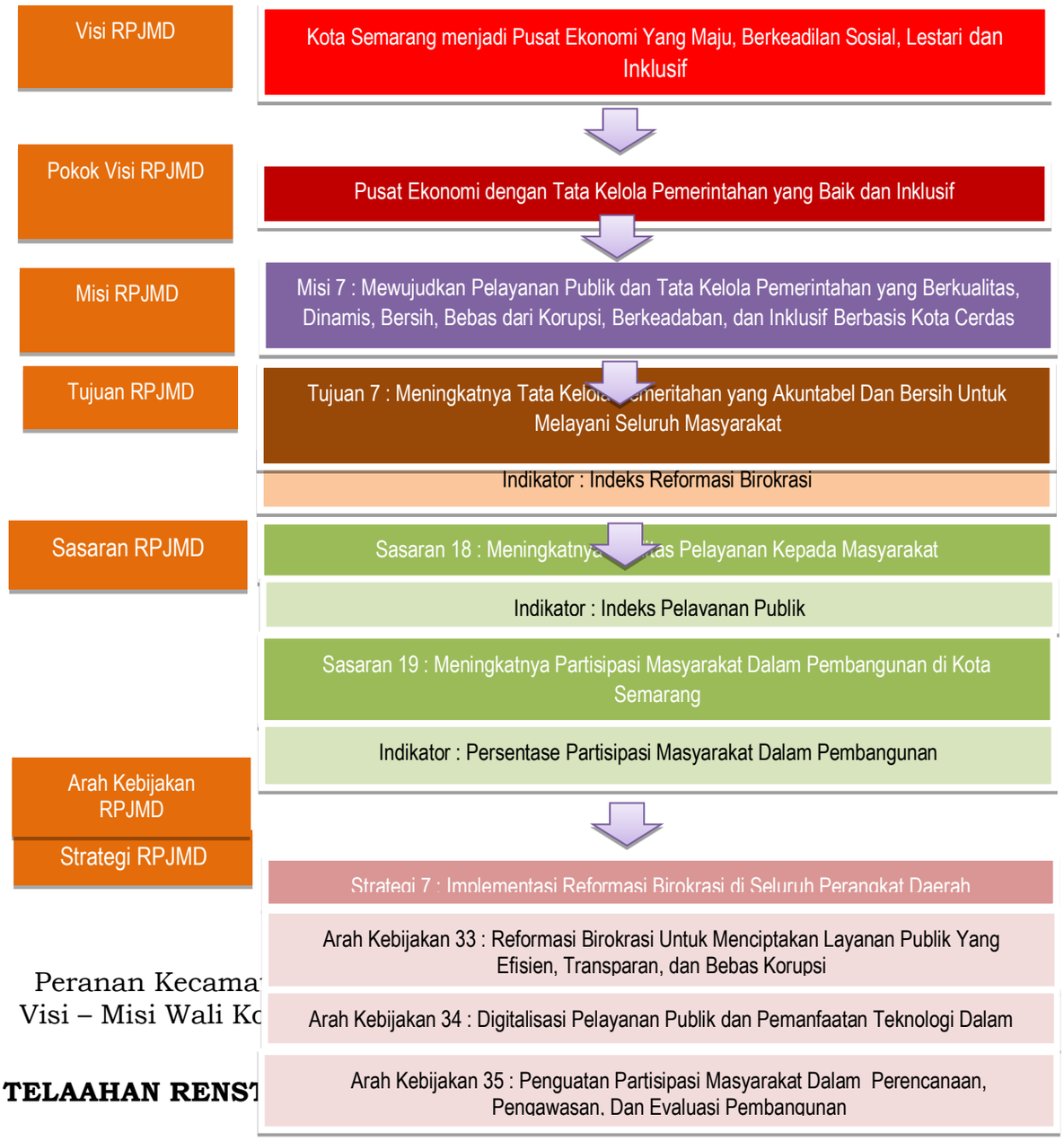

Peranan Kecama
Visi – Misi Wali Ko

B. TELAAHAN RENST

Kecamatan Semarang Barat tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, rencana struktur ruang meliputi:

1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)
   - Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
   - Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perkotaan Lainnya.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Semarang Barat masuk dalam wilayah BWK III, dengan rencana pengembangan fungsi utama sebagai kantor pelayanan pemerintahan kota. Kecamatan Semarang Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan kota. Kecamatan ini diposisikan sebagai pusat kegiatan ekonomi, transportasi, dan pariwisata yang penting.

Sedangkan Perencanaan Kecamatan Semarang Barat berdasarkan pemanfaatan ruangnya meliputi sebagai berikut:

a. **Pusat Transportasi**
   Kecamatan Semarang Barat menjadi pusat kegiatan transportasi yang signifikan, baik transportasi udara dengan adanya Bandara Ahmad Yani maupun transportasi laut.
b. **Keberadaan gardu induk dan jaringan gas bumi kilang**
   menunjukkan pentingnya kecamatan ini dalam penyediaan energi.
c. **Kawasan Industri dan Perdagangan**
   Dengan adanya kawasan peruntukan industri dan pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri, Kecamatan Semarang Barat menjadi pusat kegiatan industri yang penting.
d. **Kawasan Pariwisata**

Potensi wisata di Kecamatan Semarang Barat sangat besar, meliputi wisata religi, budaya, alam, dan bahari.

e. **Kawasan Strategis Kota**
Kecamatan Semarang Barat juga berperan sebagai kawasan strategis kota untuk sosial dan budaya, dengan adanya Kawasan Gedong Batu.

f. **Kawasan Perikanan**
Kecamatan Semarang Barat juga memiliki potensi dalam pengembangan sektor perikanan.

g. **Kawasan Resapan Air**
Kecamatan Semarang Barat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan adanya kawasan resapan air dan upaya pengendalian banjir dan rob.

Gambar 2.11
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (RTRW) 2010 – 2030

3). Rencana Struktur Ruang Kecamatan Semarang Barat

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2021, rencana struktur ruang BWK III (Semarang Barat) meliputi pusat kegiatan utama Kota Semarang, meliputi ekonomi, transportasi, pariwisata, dan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Semarang Barat akan terus berkembang menjadi kawasan yang semakin dinamis dan berkelanjutan. Dengan fokus pada industri, transportasi, dan pariwisata, kecamatan ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi Kota Semarang. Selain itu pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan penjabaran fungsi dan penerapannya di tiap kelurahan Adalah sebagai berikut :

1. Pusat lingkungan III.4 berada Kelurahan Tawangmas dengan daerah pelayanan Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Krobokan, Kelurahan Tambakharjo dan Kelurahan Karangayu;
2. Pusat lingkungan III.5 berada di Kelurahan Cebean dengan daerah pelayanan Kelurahan Salaman Mloyo, Kelurahan Bojongsalaman, Kelurahan Ngemplak Simongan dan Kelurahan Bongsari;
3. Pusat lingkungan III.6 berada di Kelurahan Manyaran dengan daerah pelayanan Kelurahan Girikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul; dan

pusat lingkungan III.7 berada di Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Kembangarum.

D. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA SEMARANG

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang. KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang.

Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (5) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan masalah strategis "**Belum optimalnya pelayanan publik yang "transparan dan akuntabel**", dan isu strategis "**Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab**", seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.18
Tema isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

PILAR	MASALAH STRATEGIS	ISU STRATEGIS
Tata Kelola Kelembagaan		

	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

F. TELAAHAN DOKUMEN LAINNYA

Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat global, nasional, maupun lokal. Komitmen terhadap kesetaraan gender tercermin melalui berbagai regulasi, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG, serta turunannya di tingkat daerah. Di Kota Semarang, penerapan PUG diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 tentang pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Kecamatan Semarang Barat menjadi salah satu unit pemerintahan yang menempatkan isu gender sebagai arus utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Kecamatan Semarang Barat tidak hanya mendokumentasikan kegiatan formal, melainkan juga merepresentasikan dinamika sosial, kelembagaan, serta inovasi lokal yang mencerminkan bagaimana PUG dapat diinternalisasikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.

Dalam literatur kebijakan publik, keberhasilan implementasi program sangat ditentukan oleh komitmen kelembagaan dan kepemimpinan (North, 1990; Peters, 2019). Kecamatan Semarang Barat menegaskan hal ini melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah PUG, pembentukan focal point gender, serta integrasi isu kesetaraan dalam Rencana Kerja Tahunan. Peran camat sebagai pimpinan institusi menjadi kunci dalam memastikan arah kebijakan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional.

Kecamatan Semarang Barat juga telah menyiapkan mekanisme kelembagaan melalui Tim Focal Point PUG, yang berfungsi sebagai penggerak dan pengawal kebijakan. Dari perspektif teori governance, keberadaan tim lintas sektor ini mencerminkan pendekatan collaborative governance (Ansell & Gash, 2008), di mana koordinasi lintas perangkat dan partisipasi masyarakat menjadi penentu efektivitas.

Salah satu capaian penting adalah ketersediaan **data terpilah berdasarkan jenis kelamin**. Hal ini sesuai dengan prinsip *evidence-based policy* yang menekankan pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan. Data terpilah memungkinkan kecamatan untuk mengidentifikasi secara lebih presisi kelompok rentan, baik perempuan, laki-laki, anak, maupun penyandang disabilitas.

Selain itu, Kecamatan Semarang Barat telah menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG bukanlah anggaran terpisah, melainkan strategi untuk memastikan alokasi anggaran program pembangunan lebih adil dan merata. Dalam kerangka teori kebijakan fiskal (Stiglitz, 2000), ARG merupakan bentuk redistribusi yang memastikan keadilan distributif (distributive justice) dapat tercapai melalui instrumen anggaran. Kecamatan Semarang Barat menunjukkan kapasitas adaptif dengan menghadirkan inovasi yang terkait langsung dengan isu gender dan pembangunan berkelanjutan.

Terdapat indikasi adanya tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan PUG di Kecamatan Semarang Barat, antara lain : Pertama, masih terbatasnya kapasitas aparatur dalam memahami konsep gender secara mendalam. Tantangan ini sejalan dengan temuan global (UNDP,

2016) bahwa salah satu hambatan terbesar dalam PUG adalah kesenjangan kapasitas birokrasi. Kedua, resistensi kultural. Dalam masyarakat patriarkal, isu gender sering dianggap bukan prioritas, atau bahkan dianggap bertentangan dengan nilai tradisional. Hal ini menuntut strategi komunikasi publik yang persuasif agar PUG tidak dipersepsikan sebagai agenda asing, tetapi sebagai kebutuhan lokal.

Ketiga, keterbatasan anggaran. Meskipun ARG telah diterapkan, proporsi anggaran yang benar-benar responsif gender masih kecil dibandingkan total belanja kecamatan. Dalam perspektif teori alokasi sumber daya (Ostrom, 1990), alokasi yang minim berpotensi menciptakan kesenjangan implementasi. Jika ditinjau dari kerangka teori keadilan distributif (Rawls, 1971), upaya Kecamatan Semarang Barat dalam PUG mencerminkan prinsip difference principle, yakni kebijakan yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan posisi kelompok paling rentan. Sementara dari perspektif Kantian, kebijakan PUG menegaskan kewajiban moral negara untuk memperlakukan setiap individu sebagai tujuan pada dirinya, bukan sekadar sebagai sarana. Lebih jauh, integrasi PUG dalam program pembangunan di Semarang Barat menunjukkan praktik nyata dari intersectionality (Crenshaw, 1989), di mana isu gender tidak dapat dilepaskan dari variabel lain seperti kelas sosial, akses ekonomi, dan kondisi lingkungan.

Dari sudut pandang governance, PUG Kecamatan Semarang Barat memberi pelajaran penting mengenai bagaimana kecamatan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dapat berperan strategis dalam menginternalisasikan kesetaraan gender. Kecamatan tidak hanya menjalankan mandat administratif, tetapi juga bertindak sebagai laboratorium sosial untuk menguji efektivitas inovasi kebijakan berbasis gender. Pada akhirnya, Kecamatan Semarang Barat menegaskan bahwa kesetaraan gender bukanlah agenda tambahan, melainkan inti dari pembangunan berkelanjutan. Dengan memperlakukan setiap individu secara adil dan setara, Kecamatan Semarang Barat tidak hanya memenuhi mandat regulasi, tetapi juga meletakkan fondasi moral dan sosial bagi terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif, resilien, dan berdaya.

Kebijakan mengenai Kota Layak Anak (KLA) telah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada generasi masa depan. Kota Semarang, melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, menegaskan komitmennya untuk menjadikan setiap anak sebagai subjek pembangunan. Kebijakan ini menekankan bahwa perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak anak tidak hanya merupakan tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Kecamatan Semarang Barat memiliki posisi strategis sebagai unit pemerintahan tingkat menengah yang menjembatani kebijakan kota dengan kebutuhan warga di tingkat kelurahan. Implementasi Kecamatan Layak Anak di Semarang Barat tidak hanya menjadi refleksi dari amanat hukum, tetapi juga bukti keseriusan pemerintah lokal dalam menghadirkan tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap isu perlindungan anak.

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2023 ini menegaskan beberapa prinsip mendasar dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak, antara lain:

1. Non-diskriminasi dalam pelayanan anak.
2. Kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.

3. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
4. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Kecamatan Semarang Barat diarahkan untuk tidak hanya melaksanakan fungsi administratif, tetapi juga melakukan pengarusutamaan perspektif hak anak dalam setiap program pembangunan. Peraturan Daerah ini memposisikan kecamatan sebagai aktor penghubung antara struktur pemerintahan makro (kota) dengan struktur mikro (kelurahan, RT/RW, keluarga, dan individu anak).

Implementasi di Kecamatan Semarang Barat

1. Penguatan Kelembagaan dan Forum Anak
   Salah satu indikator penting KLA adalah adanya Forum Anak yang berfungsi sebagai wadah partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan. Kecamatan Semarang Barat, sesuai mandat Perda, mengoordinasikan pembentukan Forum Anak Kecamatan yang terhubung dengan forum di tingkat kelurahan. Kehadiran forum ini menegaskan bahwa anak-anak bukan sekadar objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang suaranya harus didengar dalam perencanaan pembangunan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga kegiatan sosialisasi di sekolah. Selain itu, pembentukan gugus tugas KLA di Semarang Barat menjadi elemen penting dalam koordinasi lintas sektor. Gugus tugas ini melibatkan perangkat daerah, kelurahan, lembaga masyarakat, PKK, dunia usaha, hingga tokoh agama, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak terfragmentasi, melainkan sinergis.
2. Sarana dan Prasarana Ramah Anak
   Kecamatan Layak Anak menuntut adanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak yang difasilitasi untuk ruang publik yang aman untuk bermain dan berekreasi, sekolah ramah anak yang didorong melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan fasilitas kesehatan ramah anak, seperti Puskesmas dengan layanan gizi, imunisasi, dan deteksi dini stunting. Ketersediaan sarana ini memperlihatkan keseriusan Semarang Barat untuk menjawab kebutuhan anak tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga aspek psikososial.
3. Pengarusutamaan Perspektif Anak dalam Pembangunan Kecamatan Semarang Barat telah berupaya mengintegrasikan perspektif anak ke dalam setiap perencanaan. Misalnya, dalam forum Musrenbang tingkat kecamatan, usulan dari forum anak dimasukkan sebagai bagian dari dokumen perencanaan tahunan. Praktik ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pembangunan untuk anak menjadi pembangunan bersama anak.

Analisis Akademis: Model Child-Centered Governance

Dari sudut pandang akademik, implementasi Kecamatan Layak Anak di Semarang Barat merefleksikan konsep child-centered governance, sebuah pendekatan yang menempatkan anak sebagai pusat dari kebijakan publik. Teori ini mengacu pada pandangan bahwa kesejahteraan anak adalah indikator fundamental dari keberhasilan tata kelola pemerintahan. Pendekatan Semarang Barat menunjukkan praktik governance hibrid (hybrid governance), yang menggabungkan peran negara, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Misalnya, peran PKK dan Karang Taruna dalam sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keterlibatan swasta melalui program CSR untuk fasilitas

pendidikan, serta partisipasi forum anak dalam musyawarah pembangunan.

Implementasi Kecamatan Layak Anak di Semarang Barat memberikan beberapa manfaat nyata, antara lain:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
b. Terbangunnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
c. Penguatan reputasi Kecamatan Semarang Barat, baik di tingkat kota maupun nasional, sebagai kecamatan yang progresif dalam mewujudkan tata kelola ramah anak.
d. Secara makro, keberhasilan Semarang Barat berkontribusi pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-3 (kesehatan yang baik), tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas), dan tujuan ke-16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).

Kecamatan merupakan simpul penting dalam sistem pemerintahan, sebuah unit yang berfungsi menjembatani kebijakan makro di tingkat kota atau kabupaten dengan kebutuhan mikro masyarakat di tingkat kelurahan. Fungsi kecamatan bukan semata administratif, melainkan juga strategis: membangun tata kelola yang responsif, mengintegrasikan aspirasi masyarakat, serta memastikan implementasi program pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks inilah lahir konsep Kecamatan Berdaya, sebuah paradigma baru yang menekankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan partisipasi warga sebagai modal sosial pembangunan. Namun, yang membedakan Kecamatan Berdaya dari sekadar jargon birokratis adalah keberakarannya pada visi politik dan kepemimpinan daerah. Program ini bukan inisiatif sporadis, melainkan bagian integral dari agenda pembangunan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. dan H. Taj Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Dengan menempatkan Kecamatan Berdaya sebagai salah satu pilar visi mereka, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertegas orientasi pembangunan daerah yang people-centered, inklusif, dan menolak dominasi pendekatan top-down semata. Program ini menjadi bukti nyata bagaimana politik elektoral diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan konkret warga.

Kecamatan Berdaya dapat dianalisis melalui kerangka multilevel governance (Marks, Hooghe & Blank, 1996) yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada keterhubungan antar-level pemerintahan. Kecamatan dalam hal ini menjadi titik temu antara kebijakan provinsi, instrumen kota/kabupaten, dan partisipasi masyarakat di kelurahan.

Pendekatan multilevel governance memperlihatkan bahwa programprogram besar di tingkat provinsi, seperti visi pembangunan gubernur terpilih, tidak mungkin berhasil jika tidak diturunkan menjadi praktik nyata di tingkat lokal. Di sinilah Kecamatan Berdaya mengambil peran sebagai “ruang terjemahan” visi makro ke dalam intervensi mikro yang menyentuh persoalan sehari-hari warga: pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, partisipasi sosial, hingga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, gagasan pemberdayaan masyarakat dalam Kecamatan Berdaya juga berakar pada teori capability approach Amartya Sen (1999), yang menekankan bahwa pembangunan harus dilihat dari

kemampuan nyata warga untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai. Dengan demikian, keberdayaan masyarakat bukan sekadar retorika, melainkan indikator utama keberhasilan pembangunan.

Implementasi Kecamatan Berdaya menuntut pergeseran paradigma dari birokrasi kecamatan. Jika sebelumnya kecamatan sering dipersepsikan hanya sebagai perpanjangan administratif pemerintah kota/kabupaten, maka melalui program ini kecamatan harus menjadi agent of change sekaligus facilitator of empowerment.

Ada tiga dimensi strategis yang ditekankan:

a. Dimensi Administratif
   Kecamatan tetap menjalankan fungsi pelayanan publik dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan sederhana, dan fasilitasi pengaduan masyarakat. Namun, kualitas layanan harus ditingkatkan melalui inovasi digital, transparansi prosedur, dan efisiensi birokrasi.
b. Dimensi Sosial-Komunitas
   Kecamatan berfungsi sebagai simpul penguatan modal sosial, dengan mendorong partisipasi lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPMK. Program pemberdayaan harus diarahkan untuk menciptakan rasa kepemilikan bersama (sense of ownership) atas pembangunan.
c. Dimensi Ekonomi-Lingkungan
   Kecamatan juga menjadi ruang intervensi pembangunan ekonomi lokal, misalnya melalui dukungan UMKM, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan program keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Kecamatan Berdaya sekaligus selaras dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs).

Dari perspektif akademik, hal ini mencerminkan prinsip policy coherence, yakni keselarasan antara visi politik, kebijakan publik, dan implementasi teknis. Tanpa koherensi tersebut, pembangunan hanya berhenti pada tataran retorika. Kecamatan Berdaya menjadi bukti nyata bagaimana koherensi itu diciptakan.

Kecamatan sebagai unit pemerintahan lokal memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat tampil sebagai salah satu wilayah dengan potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis. Semarang Barat tidak hanya berfungsi sebagai simpul administratif, melainkan juga sebagai ruang sosial tempat berinteraksi beragam kelompok dengan latar belakang agama, budaya, dan kelas sosial yang berbeda. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kerukunan umat beragama dan harmoni sosial di Semarang Barat tidak bisa dilepaskan dari peran kecamatan sebagai mediator sekaligus fasilitator kehidupan bersama.

Kota Semarang menempati posisi yang relatif baik dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama. Indeks ini mengukur berbagai aspek, mulai dari kebebasan menjalankan ibadah, partisipasi antarumat beragama dalam kegiatan sosial, hingga tingkat konflik yang muncul akibat perbedaan keyakinan. Semarang Barat, sebagai salah satu kecamatan di wilayah selatan Kota Semarang, memperlihatkan praktik nyata harmoni tersebut.

Karakteristik sosial Semarang Barat ditandai dengan keberadaan komunitas multireligius: umat Islam sebagai mayoritas, disertai dengan komunitas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan. Berbagai rumah ibadah tersebar di wilayah ini, dari masjid besar yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, gereja-gereja di kawasan

Pudakpayung dan Srondol, hingga vihara dan pura di beberapa kelurahan. Fakta ini menunjukkan adanya pluralitas yang membutuhkan pengelolaan cermat untuk mencegah potensi gesekan sekaligus memaksimalkan peluang kolaborasi sosial.

Data indeks menunjukkan bahwa tingkat kerjasama antarumat beragama di Semarang, termasuk Semarang Barat, cukup tinggi. Kehadiran forum-forum lintas agama, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif tokoh masyarakat menjadi modal sosial (social capital) yang berkontribusi signifikan dalam menjaga harmoni. Semarang Barat menjadi contoh nyata bagaimana pluralisme dapat dikelola secara positif, bukan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai aset bersama.

Kerukunan beragama di Semarang Barat tidak hanya berimplikasi pada stabilitas sosial, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan. Kehidupan yang harmonis mendorong terciptanya suasana kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, iklim investasi, dan pengembangan potensi masyarakat. Dalam perspektif akademis, kondisi ini sesuai dengan teori social cohesion (Chan, 2006), yang menekankan bahwa stabilitas sosial merupakan prasyarat utama bagi efektivitas kebijakan pembangunan.

Misalnya, kegiatan bersama seperti kerja bakti lintas agama, perayaan Hari Kemerdekaan, hingga musyawarah pembangunan kelurahan (musrenbang) menjadi arena perjumpaan yang melampaui batas identitas. Di sinilah harmoni menemukan bentuk praksisnya: warga tidak hanya berdampingan secara fisik, tetapi juga berbagi tujuan bersama. Pemerintah Kecamatan Semarang Barat mengambil peran strategis sebagai fasilitator, memastikan bahwa setiap kelompok merasa diakui dan dihargai.

Meski harmoni di Semarang Barat relatif terjaga, tantangan tetap ada. Pertama, risiko fragmentasi sosial akibat urbanisasi yang cepat. Semarang Barat sebagai wilayah perbatasan dengan Ungaran dan menjadi jalur transit ke arah selatan, mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Perpindahan ini sering kali membawa keragaman baru yang, jika tidak dikelola, berpotensi menimbulkan eksklusi sosial.

Kedua, politisasi agama. Dalam momen politik, terutama menjelang pemilu, sentimen identitas kadang dieksploitasi untuk kepentingan elektoral. Hal ini bisa menodai relasi harmonis yang telah terbangun.

Ketiga, ketidaksetaraan ekonomi. Walaupun indeks harmoni menyoroti aspek sosial dan kultural, faktor ekonomi tetap berpengaruh. Kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu ketegangan, apalagi jika dilihat melalui lensa perbedaan kelompok. Oleh karena itu, menjaga harmoni berarti juga mengupayakan pemerataan pembangunan.

Dalam visi kepala daerah terpilih, Akhmad Lutfi dan Gus Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, konsep Kecamatan Berdaya menjadi platform utama pembangunan. Kecamatan diposisikan bukan sekadar sebagai unit birokrasi, melainkan sebagai motor penggerak partisipasi warga.

Dalam konteks Semarang Barat, implementasi Kecamatan Berdaya selaras dengan upaya menjaga kerukunan umat beragama. Sebab, pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan harmoni sosial. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, maupun digitalisasi layanan publik harus sensitif terhadap keragaman warga. Dengan demikian, Kecamatan Berdaya bukan hanya tentang efisiensi birokrasi, tetapi juga tentang membangun ekosistem inklusif yang memfasilitasi kohesi sosial.

Untuk memastikan harmoni beragama diintegrasikan ke dalam pembangunan, Semarang Barat perlu mengadopsi beberapa strategi: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat kecamatan.

FKUB dapat difungsikan tidak hanya sebagai wadah mediasi, tetapi juga sebagai laboratorium dialog sosial yang aktif menginisiasi program bersama lintas agama.

Mainstreaming toleransi dalam kebijakan pembangunan lokal. Setiap rencana kerja kecamatan perlu memasukkan perspektif keberagaman, misalnya dalam penyediaan ruang publik yang inklusif bagi seluruh komunitas.

Pemberdayaan masyarakat berbasis kerjasama lintas iman. Program UMKM, lingkungan, hingga pendidikan bisa didesain untuk melibatkan partisipasi lintas kelompok, sehingga kolaborasi menjadi kebiasaan.

Mitigasi risiko fragmentasi sosial. Kecamatan dapat berperan aktif dalam memetakan potensi konflik melalui survei sosial, kemudian melakukan langkah preventif sebelum ketegangan berkembang.

Jika dikelola secara konsisten, Semarang Barat berpotensi menjadi model best practice bagi kecamatan lain, baik di Semarang maupun Jawa Tengah. Kombinasi antara harmoni sosial yang relatif stabil, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat menciptakan sebuah ekosistem yang kondusif.

Semarang Barat bisa dipandang sebagai laboratorium sosial di mana teori pluralisme, social capital, dan governance menemukan relevansinya dalam konteks lokal. Semarang Barat menunjukkan bahwa harmoni bukan sekadar retorika, tetapi bisa dioperasionalkan melalui kebijakan, program, dan partisipasi warga.

Posyandu, sebagai institusi pelayanan berbasis masyarakat, telah menjadi fondasi penting dalam sistem desentralisasi pelayanan publik di Indonesia. Sejak awal pembentukannya, Posyandu berfokus pada isu kesehatan ibu dan anak. Namun, dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2024, peran Posyandu diperluas untuk mendukung pencapaian 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Di Kecamatan Semarang Barat, integrasi 6 SPM ke dalam Posyandu bukan hanya strategi administratif, tetapi juga bentuk inovasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat sekaligus memperluas makna pelayanan publik di tingkat paling dasar.

1. Pendidikan: Posyandu sebagai Arena Edukasi Keluarga
   SPM pendidikan menuntut pemerintah menyediakan akses pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Posyandu di Semarang Barat mengisi celah ini melalui PAUD Holistik Integratif, kelas parenting, dan penyuluhan gizi yang juga berfungsi sebagai sarana edukasi nonformal. Dengan pendekatan ini, Posyandu bukan sekadar ruang medis, tetapi juga institusi pedagogis yang memperkuat fondasi literasi dan kesehatan anak. Peran ini sejalan dengan konsep community-based education, yakni pendidikan yang berakar pada komunitas dan memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sarana pembelajaran.
2. Kesehatan: Pilar Utama Posyandu
   SPM kesehatan tetap menjadi jantung fungsi Posyandu. Di Semarang Barat, kegiatan rutin seperti imunisasi, deteksi dini stunting, penyuluhan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), serta penimbangan balita memperlihatkan kontribusi nyata terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Lebih dari itu, Posyandu juga menjadi simpul kolaborasi dengan Puskesmas dalam pemantauan epidemi lokal, misalnya pencegahan DBD atau COVID-19. Hal ini menjadikan Posyandu instrumen vital dalam sistem kesehatan primer. Hal ini memperlihatkan transformasi Posyandu sebagai grassroots health governance, yaitu tata kelola kesehatan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Edukasi Sanitasi dan Lingkungan Sekilas
   SPM pekerjaan umum dan tata ruang tampak jauh dari fungsi Posyandu. Namun, di Semarang Barat, Posyandu berperan dalam mengedukasi warga mengenai sanitasi lingkungan, drainase sehat, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Kader Posyandu misalnya sering menyampaikan kampanye penggunaan jamban sehat atau pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman obat keluarga (TOGA). Secara filosofis, ini memperlihatkan bagaimana pelayanan publik teknis dapat dijembatani melalui institusi sosialkultural yang berbasis masyarakat. Praktik ini mendukung environmental governance at micro-level, yakni tata kelola lingkungan yang dimulai dari level komunitas, bukan semata kebijakan makro.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Rumah Sehat Keluarga SPM perumahan menekankan pentingnya akses hunian layak. Posyandu di Semarang Barat mendukung melalui edukasi tentang ventilasi, pencahayaan, pengelolaan air bersih, serta pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Program “Rumah Sehat Keluarga” yang digerakkan oleh kader PKK merupakan wujud konkret kontribusi Posyandu pada dimensi ini. Kontribusi Posyandu ini sejalan dengan konsep health in all policies (HiAP), yaitu kebijakan kesehatan yang diintegrasikan ke semua sektor, termasuk perumahan.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Posyandu di Semarang Barat tidak hanya menangani isu medis, tetapi juga dilibatkan dalam kesiapsiagaan bencana. Misalnya, kader Posyandu menjadi agen komunikasi untuk peringatan dini banjir, longsor, atau kebakaran. Selain itu, Posyandu berfungsi sebagai pusat informasi sosial dalam melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dari perspektif tata kelola publik, ini memperlihatkan peran Posyandu sebagai hub komunitas untuk resilien masyarakat.
6. Sosial: Posyandu sebagai Ruang Solidaritas
   SPM sosial mengamanatkan layanan dasar untuk kelompok rentan dan miskin. Posyandu di Semarang Barat sering menjadi wadah kegiatan donor darah, santunan anak yatim, hingga kelas keterampilan bagi ibu-ibu. Fungsi sosial ini menegaskan bahwa Posyandu bukan hanya institusi kesehatan, melainkan pusat solidaritas masyarakat, tempat di mana modal sosial (social capital) dibangun dan diperkuat.
   Penerapan 6 SPM melalui Posyandu dapat dipahami dalam kerangka holistic governance, yaitu pendekatan integratif di mana berbagai sektor pelayanan publik dijalankan dalam satu simpul kelembagaan berbasis komunitas. Semarang Barat menjadi studi kasus menarik karena memperlihatkan bagaimana desentralisasi pelayanan publik tidak berarti fragmentasi, melainkan sinergi antar-sektor melalui unit paling dekat dengan masyarakat.

II.2.3 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat adalah isu strategis ke tujuh, yaitu **“Penyelenggaraan Good Governance”.** Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”. Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Semarang Barat, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Barat, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Isu Strategis Kecamatan Semarang Barat
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Barat	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Semarang Barat
		Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Barat						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat
		Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat						Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Semarang Barat

Sumber : Kecamatan Semarang Barat 2025

B A B III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Semarang Barat dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal “Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi”; “Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan”; “Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan”.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah “**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**”, dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**.

III.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG BARAT

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas

pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, yaitu :

1. **"Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Barat"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).

2. **"Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Semarang Barat"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

III.2. SASARAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG BARAT

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dimana Kecamatan Semarang Barat mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Semarang Barat.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Semarang Barat maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

- **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat**

Dengan indikator sasaran yaitu :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Barat.

Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Barat

Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

- **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat**

Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Barat**".

Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

- **Sasaran 3 :Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan**

Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat**".

Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Barat melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Semarang Barat.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat												
	TUJUAN : **Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat**		**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Barat**	**Angka**	**94,23**	**94,35**	**94,50**	**94,75**	**95,00**	**95,30**	**95,60**	
		SASARAN 1 : **Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Barat**	**Angka**	**75,75**	**75,76**	**75,77**	**75,78**	**75,79**	**75,61**	**75,62**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Semarang Barat	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Barat**	**Angka**	**92,33**	**92,50**	**92,75**	**93,00**	**93,25**	**93,50**	**93,75**	
		SASARAN 2 : **Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat**	**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Barat**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**96,00**	**97,00**	**98,00**	**99,00**	**100,00**	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Barat	**Angka**	**78,00**	**79,00**	**80,00**	**81,00**	**82,00**	**83,00**	**84,00**	
	Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang											
		SASARAN 3 : **Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan**	**Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat**	**Angka**	**76,00**	**78,00**	**80,00**	**82,00**	**84,00**	**86,00**	**88,00**	

Sumber: Kecamatan Semarang Barat 2025

III.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

III.3.1 STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat	Memaksimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat	Menguatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat	Menyempurnakan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat	Penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat	Percepatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat
pengembangan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat	Percepatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat

Sumber: Kecamatan Semarang Barat 2025

III.3.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara

bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang
(b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Barat;
(c) Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Barat.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Barat;
(b) Peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
(c) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat;
(d) Peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Barat;
(e) Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Barat;
(f) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Barat.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat;
(b) Peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Barat;
(c) Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat;
(d) Peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Barat.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Barat	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Barat	
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Barat	
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Barat	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Bara	
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Barat	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Barat	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Barat	

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Barat	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Barat	

Sumber: Kecamatan Semarang Barat 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan Semarang Barat
			Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Barat
			Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Barat
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat	Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Barat
			Peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Barat
			Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Barat
			Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Barat
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat	Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Barat
			Peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Barat
			Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat
			Peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Barat

Sumber: Kecamatan Semarang Barat 2025

B A B IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN SEMARANG BARAT

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Semarang Barat untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Semarang Barat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat**	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat		**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Barat**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Camat
					Nilai Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Barat (Angka)		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Barat (Angka)		
					Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang berkualitas		
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat		Sekretaris Kecamatan
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Barat beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
							Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat			Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Barat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Barat sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Staf Subbagian Umum dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan yang tepat waktu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Seksi Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayanan Publik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Seksi Pelayanan Publik
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Ngemplak Simongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Simongan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Ngemplak Simongan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngemplak Simongan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Ngemplak Simongan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Manyaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Manyaran	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Manyaran
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manyaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manyaran)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manyaran)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Manyaran
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Krapyak	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Lurah Krapyak

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Krapyak	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krapyak)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krapyak)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krapyak)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Krapyak
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Tambakharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambakharjo	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Tambakharjo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakharjo)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakharjo)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Tambakharjo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kalibanteng Kulon
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Kalibanteng Kulon
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Kalibanteng Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalibanteng Kidul	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kalibanteng Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Kalibanteng Kidul
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Gisikdrono	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gisikdrono	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Gisikdrono
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gisikdrono)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gisikdrono)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gisikdrono)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Gisikdrono
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bongsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bongsari	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bongsari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bongsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bongsari)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bongsari)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Bongsari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bojongsalaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bojongsalaman	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bojongsalaman
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bojongsalaman)	Kecamatan (Kelurahan Bojongsalaman)	Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bojongsalaman)	Kelurahan Bojongsalaman
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Salamanmloyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Salamanmloyo	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Salamanmloyo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Salamanmloyo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Salamanmloyo)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Salamanmloyo)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Salamanmloyo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Cabean	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cabean	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Cabean
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cabean)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cabean)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cabean)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Cabean
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Karangayu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangayu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Karangayu
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangayu)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangayu)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangayu)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Karangayu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Krobokan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Krobokan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Krobokan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krobokan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krobokan)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krobokan)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Krobokan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Tawangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tawangsari	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Tawangsari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangsari)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangsari)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Tawangsari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Tawangmas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tawangmas	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Tawangmas
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangmas)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangmas)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangmas)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Tawangmas
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Kembangarum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Lurah Kembangarum

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kembangarum	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kembangarum)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kembangarum)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kembangarum)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Kembangarum
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat pada Kecamatan Semarang Barat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kecamatan Semarang Barat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kepala Seksi Pembangunan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kecamatan Semarang Barat)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Seksi Pembangunan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Ngemplak Simongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Ngemplak Simongan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Ngemplak Simongan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Ngemplak Simongan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Manyaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Manyaran	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Manyaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Manyaran)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Manyaran)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Manyaran)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Manyaran
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Krapyak	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Krapyak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Krapyak
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Krapyak)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Krapyak)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Krapyak)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Krapyak
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Tambakharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Tambakharjo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tambakharjo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakharjo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakharjo)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakharjo)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Tambakharjo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kalibanteng Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Kalibanteng Kulon	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kalibanteng Kulon
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Kalibanteng Kulon

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kalibanteng Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Kalibanteng Kidul	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kalibanteng Kidul
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Kalibanteng Kidul
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Gisikdrono)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Gisikdrono)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Gisikdrono
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gisikdrono)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gisikdrono)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gisikdrono)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Gisikdrono
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bongsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Bongsari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bongsari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bongsari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bongsari)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bongsari)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Bongsari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bojongsalaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Bojongsalaman	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bojongsalaman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bojongsalaman)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bojongsalaman)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bojongsalaman)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Bojongsalaman
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Salamanmloyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Salamanmloyo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Salamanmloyo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Salamanmloyo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Salamanmloyo)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Salamanmloyo)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Salamanmloyo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Cabean	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Cabean	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Cabean
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Cabean)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Cabean)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Cabean)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Cabean
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Karangayu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Karangayu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Karangayu
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangayu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangayu)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangayu)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Karangayu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Krobokan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Krobokan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Krobokan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Krobokan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Krobokan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Krobokan)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Krobokan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Tawangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Tawangsari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tawangsari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangsari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangsari)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangsari)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Tawangsari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Tawangmas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Tawangmas	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tawangmas
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangmas)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangmas)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangmas)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Tawangmas
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kembangarum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Kembangarum	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kembangarum

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kembangarum)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kembangarum)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kembangarum)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Kembangarum
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		S3: Meningkatnya kualitas kinerja	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
kecamatan dalam pembangunan		lembaga kemasyarakatan	dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Semarang Barat	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Semarang Barat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Seksi Pembangunan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pada Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngemplak Simongan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Ngemplak Simongan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Ngemplak Simongan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Manyaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Manyaran	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Manyaran
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Manyaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Manyaran)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Manyaran)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
							Kelurahan Manyaran
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Krapyak	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Krapyak	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Krapyak
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krapyak)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krapyak)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krapyak)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Krapyak
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tambakharjo	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tambakharjo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakharjo)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakharjo)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Tambakharjo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kalibanteng Kulon
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Kalibanteng Kulon
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kalibanteng Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Kalibanteng Kidul
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gisikdrono	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Gisikdrono
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gisikdrono)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gisikdrono)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gisikdrono)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Gisikdrono
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bongsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bongsari	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bongsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bongsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bongsari)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bongsari)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Bongsari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bojongsalaman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bojongsalaman
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bojongsalaman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bojongsalaman)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bojongsalaman)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Bojongsalaman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Salamanmloyo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Salamanmloyo	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Salamanmloyo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Salamanmloyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Salamanmloyo)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Salamanmloyo)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Salamanmloyo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Cabean	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Cabean	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Cabean
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cabean)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cabean)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cabean)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Cabean
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Karangayu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Karangayu	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Karangayu
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangayu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangayu)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangayu)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Karangayu
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Krobokan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Krobokan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Krobokan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krobokan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krobokan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krobokan)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
							Kelurahan Krobokan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tawangsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tawangsari	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tawangsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangsari)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangsari)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Tawangsari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tawangmas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tawangmas	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tawangmas
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangmas)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangmas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangmas)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Tawangmas
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kembangarum	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kembangarum	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kembangarum
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kembangarum)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kembangarum)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kembangarum)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Kembangarum
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Semarang Barat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				mitra pemerintah di Kecamatan Semarang Barat			
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Semarang Barat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Semarang Barat)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngemplak Simongan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Ngemplak Simongan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Ngemplak Simongan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Manyaran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Manyaran	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Manyaran
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Manyaran)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Manyaran)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Manyaran)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Manyaran
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Krapyak	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Krapyak	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Krapyak
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Krapyak)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krapyak)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Krapyak)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Krapyak

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambakharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambakharjo	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tambakharjo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakharjo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakharjo)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakharjo)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Tambakharjo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalibanteng Kulon	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kalibanteng Kulon
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Kalibanteng Kulon
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalibanteng Kidul	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kalibanteng Kidul
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Kalibanteng Kidul
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gisikdrono	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gisikdrono	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Gisikdrono
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gisikdrono)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gisikdrono)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gisikdrono)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Gisikdrono

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bongsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bongsari	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bongsari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bongsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bongsari)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bongsari)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Bongsari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bojongsalaman	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bojongsalaman
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bojongsalaman)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bojongsalaman)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bojongsalaman)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Bojongsalaman
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Salamanmloyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Salamanmloyo	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Salamanmloyo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Salamanmloyo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Salamanmloyo)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Salamanmloyo)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Salamanmloyo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cabean	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cabean	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Cabean
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cabean)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cabean)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cabean)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Cabean

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangayu	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangayu	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Karangayu
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangayu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangayu)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangayu)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Cabean
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Krobokan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Krobokan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Krobokan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Krobokan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krobokan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Krobokan)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Krobokan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tawangsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tawangsari	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tawangsari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tawangsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawangsari)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tawangsari)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Tawangsari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tawangmas	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tawangmas	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tawangmas
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tawangmas)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawangmas)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tawangmas)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Tawangmas

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kembangarum	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kembangarum	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kembangarum
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kembangarum)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kembangarum)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kembangarum)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan/Staf Kelurahan Kembangarum
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat		RPJMD
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling)	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
5.	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	Pengembangan Musrenbang Tematik	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
7.	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
8.	Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
9.	Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2025 – 2029

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Semarang Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN SEMARANG BARAT				75.511.386.644		80.767.827.761		83.055.675.607		83.475.920.746		84.467.191.999	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang berkualitas	100,00%	100,00%	25.588.249.776	100,00%	26.841.879.537	100,00%	28.175.936.987	100,00%	29.270.265.399	100,00%	30.523.410.286	
7.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	100,00%	19.316.000	100,00%	21.118.120	100,00%	22.596.388	100,00%	22.618.985	100,00%	22.641.604	
7.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	539.000	4 Dokumen	576.730	4 Dokumen	617.101	6 Dokumen	617.718	4 Dokumen	618.336	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	506.000	1 Dokumen	541.420	1 Dokumen	579.319	1 Dokumen	579.899	1 Dokumen	580.479	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	1 Dokumen	956.580	1 Dokumen	1.023.541	1 Dokumen	1.024.564	1 Dokumen	1.025.589	Kecamatan Semarang Barat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	759.000	1 Dokumen	812.130	1 Dokumen	868.979	1 Dokumen	869.848	1 Dokumen	870.718	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	1 Dokumen	956.580	1 Dokumen	1.023.541	1 Dokumen	1.024.564	1 Dokumen	1.025.589	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	5 Laporan	724.000	5 Laporan	774.680	5 Laporan	828.908	5 Laporan	829.737	5 Laporan	830.566	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	17.655.000	1 Dokumen	17.672.655	1 Dokumen	17.690.328	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	100,00%	22.702.670.952	100,00%	23.802.711.897	100,00%	24.958.935.173	100,00%	26.146.712.889	100,00%	27.412.720.401	
7.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	128 Orang	128 Orang	21.858.174.952	128 Orang	22.951.076.620	128 Orang	24.098.623.300	128 Orang	25.303.547.242	128 Orang	26.568.717.310	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	842.000.000	12 Dokumen	848.964.557	12 Dokumen	857.454.203	12 Dokumen	840.305.119	12 Dokumen	841.145.424	Kecamatan Semarang Barat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	894.000	1 Laporan	956.580	1 Laporan	1.023.541	1 Laporan	1.024.564	1 Laporan	1.023.540	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Laporan	12 Laporan	708.000	12 Laporan	757.560	12 Laporan	810.589	12 Laporan	811.400	12 Laporan	810.588	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	1 Dokumen	956.580	1 Dokumen	1.023.541	1 Dokumen	1.024.564	1 Dokumen	1.023.540	Kecamatan Semarang Barat
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	96,00%	97,00%		97,00%		97,33%		97,67%		98,00%		
7.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	N/A	86 Angka	36.000.000	86 Angka	38.520.000	88 Angka	41.216.400	90 Angka	40.804.236	92 Angka	40.845.040	
7.01.01.1.05. 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	N/A	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.700.000	4 Dokumen	11.449.000	4 Dokumen	11.334.510	4 Dokumen	11.345.845	Kecamatan Semarang Barat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01.1.05. 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	100	26.000.000	100	27.820.000	100	29.767.400	100	29.469.726	100	29.499.196	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Barat	100,00%	100,00%	339.500.000	100,00%	377.045.000	100,00%	402.493.490	100,00%	393.126.155	100,00%	394.289.788	
7.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12 Paket	68.000.000	12 Paket	72.760.000	12 Paket	79.452.540	12 Paket	78.658.015	12 Paket	78.878.243	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12 Paket	32.000.000	12 Paket	34.240.000	12 Paket	36.636.800	12 Paket	36.270.432	12 Paket	36.379.243	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	47.000.000	12 Laporan	50.290.000	12 Laporan	53.810.300	12 Laporan	53.272.197	12 Laporan	53.432.014	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	86.500.000	12 Laporan	92.555.000	12 Laporan	99.033.850	12 Laporan	98.043.512	12 Laporan	98.337.642	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4 Dokumen	106.000.000	4 Dokumen	127.200.000	4 Dokumen	133.560.000	4 Dokumen	126.882.000	4 Dokumen	127.262.646	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk	100,00%	100,00%	132.000.000	100,00%	158.400.000	100,00%	166.320.000	100,00%	158.004.000	100,00%	158.478.012	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat												
7.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8 Unit	6 Unit	132.000.000	8 Unit	158.400.000	10 Unit	166.320.000	12 Unit	158.004.000	14 Unit	158.478.012	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	1.732.762.824	100,00%	1.762.584.520	100,00%	1.855.170.536	100,00%	1.787.086.184	100,00%	1.771.800.578	
7.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	208.262.824	12 Laporan	222.839.520	12 Laporan	238.438.286	12 Laporan	235.023.224	12 Laporan	235.258.247	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1.524.500.000	12 Laporan	1.539.745.000	12 Laporan	1.616.732.250	12 Laporan	1.552.062.960	12 Laporan	1.536.542.330	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Barat sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	626.000.000	100,00%	681.500.000	100,00%	729.205.000	100,00%	721.912.950	100,00%	722.634.863	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	302.000.000	55 Unit	323.140.000	55 Unit	345.759.800	55 Unit	342.302.202	55 Unit	342.644.504	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	22 Unit	178.000.000	22 Unit	190.460.000	24 Unit	203.792.200	26 Unit	201.754.278	28 Unit	201.956.032	Kecamatan Semarang Barat
7.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	146.000.000	4 Unit	167.900.000	4 Unit	179.653.000	4 Unit	177.856.470	4 Unit	178.034.326	Kecamatan Semarang Barat
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100,00%	100,00%	1.648.200.000	100,00%	1.758.574.000	100,00%	1.881.674.180	100,00%	1.862.857.438	100,00%	1.864.720.296	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100,00%	100,00%	29.200.000	100,00%	31.244.000	100,00%	33.431.080	100,00%	33.096.769	100,00%	33.129.866	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A	1 Laporan	4.200.000	1 Laporan	4.494.000	1 Laporan	4.808.580	1 Laporan	4.760.494	1 Laporan	4.765.255	Kecamatan Semarang Barat
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	26.750.000	3 Dokumen	28.622.500	3 Dokumen	28.336.275	3 Dokumen	28.364.611	Kecamatan Semarang Barat
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00%	100,00%	1.294.000.000	100,00%	1.384.580.000	100,00%	1.481.500.600	100,00%	1.466.685.594	100,00%	1.468.152.280	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	142.000.000	12 Laporan	151.940.000	12 Laporan	162.575.800	12 Laporan	160.950.042	12 Laporan	161.110.992	Kecamatan Semarang Barat
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Ngemplak Simongan
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manyaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Manyaran

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krapyak)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Krapyak
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Tambakharjo
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Kalibanteng Kulon
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Kalibanteng Kidul
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gisikdrono)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Gisikdrono
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bongsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Bongsari

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bojongsalaman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Bojongsalaman
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Salamanmloyo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Salamanmloyo
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cabean)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Cabean
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangayu)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Karangayu
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krobokan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Krobokan
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Tawangsari

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangmas)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Tawangmas
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kembangarum)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	82.432.800	12 Laporan	81.608.472	12 Laporan	81.690.080	Kelurahan Kembangarum
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	100,00%	325.000.000	100,00%	342.750.000	100,00%	366.742.500	100,00%	363.075.075	100,00%	363.438.150	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	229.000.000	12 Laporan	240.030.000	12 Laporan	256.832.100	12 Laporan	254.263.779	12 Laporan	254.518.043	Kecamatan Semarang Barat
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Ngemplak Simongan
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Manyaran)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Manyaran
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Krapyak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
yang Dilimpahkan (Kelurahan Krapyak)													
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakharjo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Tambakharjo
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Kalibanteng Kulon
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Kalibanteng Kidul
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gisikdrono)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Gisikdrono
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bongsari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Bongsari
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bojongsalaman)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Bojongsalaman

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Salamanmloyo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Salamanmloyo
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Cabean)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Cabean
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangayu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Karangayu
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Krobokan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Krobokan
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangsari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Tawangsari
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangmas)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Tawangmas
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.420.000	12 Laporan	6.869.400	12 Laporan	6.800.706	12 Laporan	6.807.507	Kelurahan Kembangarum

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
yang Dilimpahkan (Kelurahan Kembangarum)													
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Barat	N/A	100,00%	38.803.334	100,00%	42.908.557	100,00%	44.695.342	100,00%	45.023.548	100,00%	45.797.720	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	N/A	12 Kegiatan	38.803.334	12 Kegiatan	42.908.557	12 Kegiatan	44.695.342	12 Kegiatan	45.023.548	12 Kegiatan	45.797.720	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Kegiatan	38.803.334	12 Kegiatan	42.908.557	12 Kegiatan	44.695.342	12 Kegiatan	45.023.548	12 Kegiatan	45.797.720	Kecamatan Semarang Barat
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Barat	95,00%	96,00%	80.341.176	97,00%	88.840.921	98,00%	92.540.406	99,00%	93.219.949	100,00%	94.822.849	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	80.341.176	2 Kegiatan	88.840.921	2 Kegiatan	92.540.406	2 Kegiatan	93.219.949	2 Kegiatan	94.822.849	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	80.341.176	100 Orang	88.840.921	100 Orang	92.540.406	100 Orang	93.219.949	100 Orang	94.822.849	Kecamatan Semarang Barat
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	99,00%	100,00%	48.155.792.358	100,00%	52.035.624.747	100,00%	52.860.828.692	100,00%	52.204.554.412	100,00%	51.938.440.849	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan hasil musrenbang	17 Laporan	17 Laporan	1.337.800.000	17 Laporan	1.471.580.000	17 Laporan	1.574.590.600	17 Laporan	1.558.844.694	17 Laporan	1.560.403.539	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	54.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	59.400.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	63.558.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	62.922.420	6 Lembaga Kemasyarakatan	62.985.342	Kecamatan Semarang Barat
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	144 Kegiatan		144 Kegiatan		146 Kegiatan		148 Kegiatan		150 Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	250.000.000	6 Pokmas/ Ormas	275.000.000	6 Pokmas /Ormas	294.250.000	6 Pokmas/ Ormas	291.307.500	6 Pokmas/ Ormas	291.598.808	Kelurahan Ngemplak Simongan
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	70.600.000	6 Pokmas/ Ormas	77.660.000	6 Pokmas /Ormas	83.096.200	6 Pokmas/ Ormas	82.265.238	6 Pokmas/ Ormas	82.347.503	Kelurahan Manyaran

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Manyaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	78.000.000	6 Pokmas/ Ormas	85.800.000	6 Pokmas /Ormas	91.806.000	6 Pokmas/ Ormas	90.887.940	6 Pokmas/ Ormas	90.978.828	Kelurahan Krapyak
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krapyak)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	72.800.000	6 Pokmas/ Ormas	80.080.000	6 Pokmas /Ormas	85.685.600	6 Pokmas/ Ormas	84.828.744	6 Pokmas/ Ormas	84.913.573	Kelurahan Tambakharjo
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	51.600.000	6 Pokmas/ Ormas	56.760.000	6 Pokmas /Ormas	60.733.200	6 Pokmas/ Ormas	60.125.868	6 Pokmas/ Ormas	60.185.994	Kelurahan Kalibanteng Kulon
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	54.200.000	6 Pokmas/ Ormas	59.620.000	6 Pokmas /Ormas	63.793.400	6 Pokmas/ Ormas	63.155.466	6 Pokmas/ Ormas	63.218.621	Kelurahan Kalibanteng Kidul
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	59.000.000	6 Pokmas/ Ormas	64.900.000	6 Pokmas /Ormas	69.443.000	6 Pokmas/ Ormas	68.748.570	6 Pokmas/ Ormas	68.817.319	Kelurahan Gisikdrono
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gisikdrono)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	82.600.000	6 Pokmas/ Ormas	90.860.000	6 Pokmas /Ormas	97.220.200	6 Pokmas/ Ormas	96.247.998	6 Pokmas/ Ormas	96.344.246	Kelurahan Bongsari
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bongsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	65.800.000	6 Pokmas/ Ormas	72.380.000	6 Pokmas /Ormas	77.446.600	6 Pokmas/ Ormas	76.672.134	6 Pokmas/ Ormas	76.748.806	Kelurahan Bojongsalaman

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Masyarakat di Kelurahan												
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bojongsalaman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	65.800.000	6 Pokmas/ Ormas	72.380.000	6 Pokmas /Ormas	77.446.600	6 Pokmas/ Ormas	76.672.134	6 Pokmas/ Ormas	76.748.806	Kelurahan Salamanmloyo
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Salamanmloyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	53.200.000	6 Pokmas/ Ormas	58.520.000	6 Pokmas /Ormas	62.616.400	6 Pokmas/ Ormas	61.990.236	6 Pokmas/ Ormas	62.052.226	Kelurahan Cabean
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cabean)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	50.600.000	6 Pokmas/ Ormas	55.660.000	6 Pokmas /Ormas	59.556.200	6 Pokmas/ Ormas	58.960.638	6 Pokmas/ Ormas	59.019.599	Kelurahan Karangayu
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangayu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	53.200.000	6 Pokmas/ Ormas	58.520.000	6 Pokmas /Ormas	62.616.400	6 Pokmas/ Ormas	61.990.236	6 Pokmas/ Ormas	62.052.226	Kelurahan Krobokan
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krobokan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	72.600.000	6 Pokmas/ Ormas	79.860.000	6 Pokmas /Ormas	85.450.200	6 Pokmas/ Ormas	84.595.698	6 Pokmas/ Ormas	84.680.294	Kelurahan Tawangsari
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	52.200.000	6 Pokmas/ Ormas	57.420.000	6 Pokmas /Ormas	61.439.400	6 Pokmas/ Ormas	60.825.006	6 Pokmas/ Ormas	60.885.831	Kelurahan Tawangmas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangmas)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	64.800.000	6 Pokmas/ Ormas	71.280.000	6 Pokmas /Ormas	76.269.600	6 Pokmas/ Ormas	75.506.904	6 Pokmas/ Ormas	75.582.411	Kelurahan Kembangarum
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kembangarum)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas /Ormas	86.800.000	6 Pokmas/ Ormas	95.480.000	6 Pokmas /Ormas	102.163.600	6 Pokmas/ Ormas	101.141.964	6 Pokmas/ Ormas	101.243.106	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	4 Dokumen	46.817.992.358	4 Dokumen	50.564.044.747	4 Dokumen	51.286.238.092	4 Dokumen	50.645.709.718	4 Dokumen	50.378.037.310	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4 Lembaga	127.000.000	4 Lembaga	139.700.000	4 Lembaga	143.097.000	4 Lembaga	140.235.060	4 Lembaga	140.375.295	Kecamatan Semarang Barat
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.900.200.000	6 Lembaga	3.132.216.000	6 Lembaga	3.174.860.320	6 Lembaga	3.135.111.717	6 Lembaga	3.131.976.605	Kelurahan Ngemplak Simongan
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Manyaran)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	4.563.400.000	6 Lembaga	4.928.472.000	6 Lembaga	5.007.041.440	6 Lembaga	4.948.971.026	6 Lembaga	4.899.481.315	Kelurahan Manyaran
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Krapyak)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.200.800.000	6 Lembaga	2.376.864.000	6 Lembaga	2.404.401.280	6 Lembaga	2.372.357.267	6 Lembaga	2.369.984.910	Kelurahan Krapyak
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakharjo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.183.400.000	6 Lembaga	1.278.072.000	6 Lembaga	1.283.633.440	6 Lembaga	1.262.797.106	6 Lembaga	1.264.059.903	Kelurahan Tambakharjo

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.375.624.030	6 Lembaga	1.485.673.952	6 Lembaga	1.495.387.431	6 Lembaga	1.472.433.557	6 Lembaga	1.473.905.991	Kelurahan Kalibanteng Kulon
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.708.400.000	6 Lembaga	1.845.072.000	6 Lembaga	1.861.973.440	6 Lembaga	1.835.353.706	6 Lembaga	1.837.189.059	Kelurahan Kalibanteng Kidul
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gisikdrono)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	4.672.400.000	6 Lembaga	5.046.192.000	6 Lembaga	5.127.115.840	6 Lembaga	5.067.844.682	6 Lembaga	5.017.166.235	Kelurahan Gisikdrono
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bongsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.755.000.000	6 Lembaga	2.975.400.000	6 Lembaga	3.014.908.000	6 Lembaga	2.976.758.920	6 Lembaga	2.973.782.161	Kelurahan Bongsari
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bojongsalaman)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.652.800.000	6 Lembaga	2.865.024.000	6 Lembaga	2.902.324.480	6 Lembaga	2.865.301.235	6 Lembaga	2.862.435.934	Kelurahan Bojongsalaman
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Salamanmloyo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.551.400.000	6 Lembaga	1.675.512.000	6 Lembaga	1.689.022.240	6 Lembaga	1.664.132.018	6 Lembaga	1.665.796.150	Kelurahan Salamanmloyo
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cabean)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	5.552.600.000	6 Lembaga	5.996.808.000	6 Lembaga	6.096.744.160	6 Lembaga	6.027.776.718	6 Lembaga	5.967.498.951	Kelurahan Cabean
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangayu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.948.600.000	6 Lembaga	2.104.488.000	6 Lembaga	2.146.577.760	6 Lembaga	2.117.111.982	6 Lembaga	2.114.994.870	Kelurahan Karangayu
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Krobokan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	4.121.468.328	6 Lembaga	4.451.185.794	6 Lembaga	4.520.209.510	6 Lembaga	4.467.007.415	6 Lembaga	4.422.337.341	Kelurahan Krobokan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tawangsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.274.600.000	6 Lembaga	2.456.568.000	6 Lembaga	2.485.699.360	6 Lembaga	2.452.842.366	6 Lembaga	2.450.389.524	Kelurahan Tawangsari
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tawangmas)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.365.000.000	6 Lembaga	2.554.200.000	6 Lembaga	2.585.284.000	6 Lembaga	2.551.431.160	6 Lembaga	2.548.879.729	Kelurahan Tawangmas
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kembangarum)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	4.672.600.000	6 Lembaga	5.046.408.000	6 Lembaga	5.127.336.160	6 Lembaga	5.068.062.798	6 Lembaga	5.017.382.170	Kelurahan Kembangarum
	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.700.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.099.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.525.930	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.512.878	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.519.391	Kecamatan Semarang Barat
	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	187.000.000	12 Laporan	200.090.000	12 Laporan	214.096.300	12 Laporan	213.668.107	12 Laporan	213.881.776	Kecamatan Semarang Barat

Sumber : Kecamatan Semarang Barat 2025

IV.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Proyeksi Pendapatan Retribusi
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

KODE REKENING	RETRIBUSI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	11.820.000	11.820.000	12.387.000	12.933.000	13.437.000	13.941.000

Sumber : Kecamatan Semarang Barat 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Barat yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat									
	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Barat	Angka	94,35	94,50	94,75	95,00	95,30	95,60	
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat									
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Barat	Angka	75,76	75,77	75,78	75,79	75,61	75,62	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	92,50	92,75	93,00	93,25	93,50	93,75	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan									
	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	95,00	96,00	97,00	99,00	99,00	100,00	
	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan	Angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan									
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Sumber : Kecamatan Semarang Barat 2025

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

Sumber : RPJMD Kota Semarang 2025-2029

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan unsur penunjang kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Permasalahan belum optimalnya kualitas kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pemerintahan yang terpadu, berdayaguna dan berhasil guna Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

39. KECAMATAN SEMARANG TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Semarang maka Kecamatan Semarang Timur wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang kewilayahan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
26. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

27. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Semarang Timur adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Timur adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Timur, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Timur. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Semarang Timur yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Semarang Timur mempunyai luas sebesar 770,28 Ha secara administratif terbagi dalam 10 (sepuluh) kelurahan. Kecamatan Semarang Timur dengan luas wilayah 5,42 km² termasuk dalam kategori kecamatan dengan luas wilayah kecil di Kota Semarang. Jika dibandingkan, kecamatan seperti Mijen (56,52 km²) dan Gunungpati (58,27 km²) memiliki luas hampir dua kali lipat lebih besar, sementara kecamatan-kecamatan seperti Semarang Tengah (5,17 km²) jauh lebih kecil. Kecamatan yang sedikit lebih besar dari Semarang Timur antara lain Tembalang (39,47 km²) dan Ngaliyan (42,99 km²), sedangkan Semarang Tengah (5,17 km²) sedikit lebih kecil. Secara umum, Banyumanik berada di tengah-tengah, lebih luas dibanding kecamatan perkotaan seperti Semarang Tengah (5,17 km²) namun masih lebih kecil dari kecamatan di pinggiran. Kecamatan Semarang Timur terletak di sisi timur wilayah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kecamatan Semarang Utara
Sebelah selatan : Kecamatan Semarang Selatan
Sebelah timur : Kecamatan Semarang Timur
Sebelah barat : Kecamatan Semarang Barat

Peta Wilayah Kecamatan Semarang Timur

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Semarang, tugas pokok dari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Semarang Timur mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
i. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
k. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
m. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
n. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Timur telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi kecamatan sebagai berikut:

a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri atas;
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Publik;
g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
h. Kelurahan terdiri atas :
    1. Lurah;
    2. Sekretariat;
    3. Seksi Pembangunan;
    4. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
    5. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
i. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

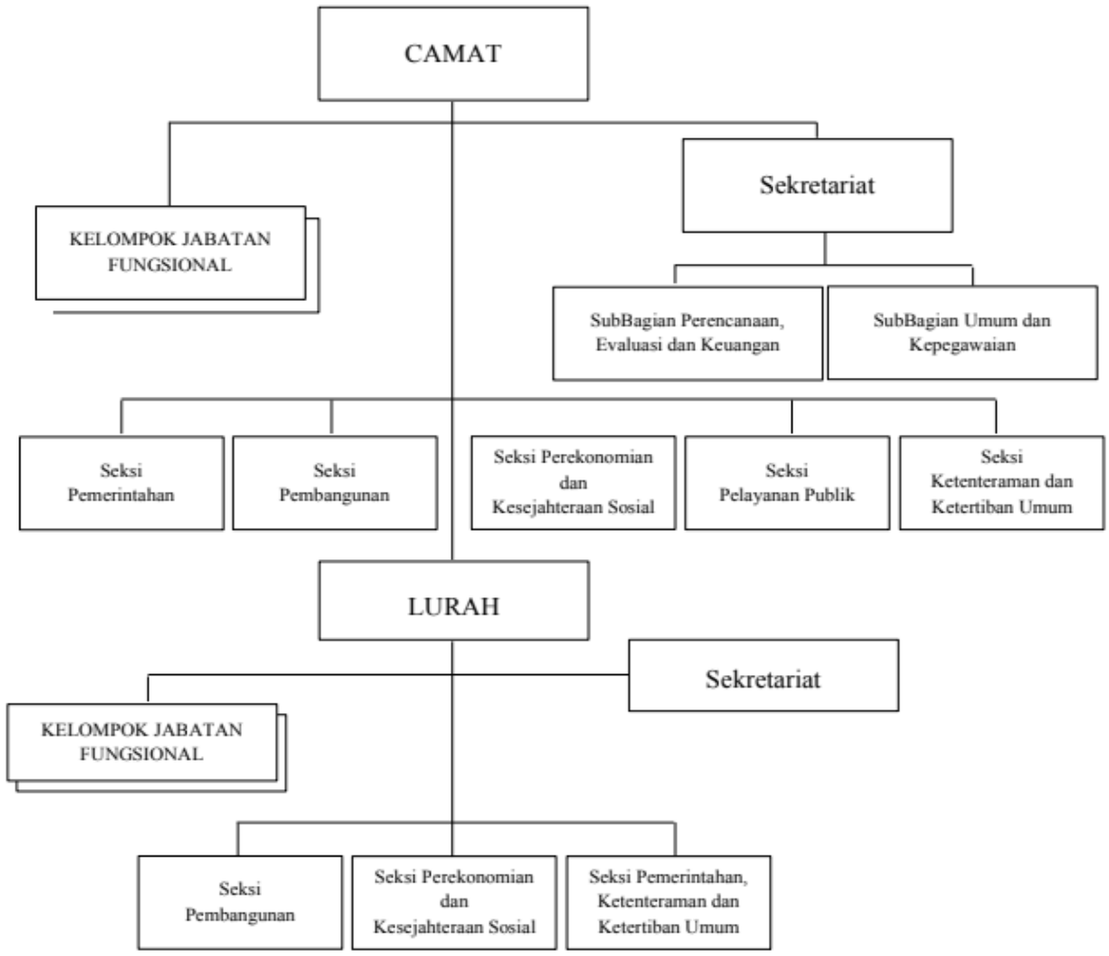

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Semarang Timur

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Semarang Timur adalah sebagai berikut:

1. Camat

   Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

   - perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
   - perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
   - pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
   - penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;

- penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
- penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
- penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
- penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
- penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
- penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
- penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
- penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;

- pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
- pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
- pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
- pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
- pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
- pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
- pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;
- pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;

- pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
- pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
- menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

- menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
- menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
- menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;

- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
- menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, *Water Closet* umum, terminal);
- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di

wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;

- menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
- menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
- menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
- menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
- menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
- menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
- menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
- menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
- menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
- menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;

- menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
- menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;

- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
- menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
- menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara

Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

- menyiapkan kegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan fasilitasi kunjungan tamu di Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- menyiapkan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- menyiapkan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- menyiapkan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dan penyediaan bahan/material serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- menyiapkan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- menyiapkan kegiatan pengadaan mebel, dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- menyiapkan kegiatan pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tak berwujud, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- menyiapkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- menyiapkan kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya, pemeliharaan aset tak berwujud, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- menyiapkan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pengamanan barang milik daerah Kecamatan;
- menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan Budaya Kerja Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan Zona Integritas;
- menyiapkan kegiatan pengembangan inovasi Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;

- menyiapkan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan bagi pegawai Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

9. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- menyiapkan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, antara lain: Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan, Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;

- menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
- menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah Kecamatan; menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan, penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan manajemen resiko dan rencana tindak pengendalian;
- menyiapkan kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pengolahan data retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penetapan wajib retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan pelaporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Lurah

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
- melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan;
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan;
- melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;
- melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Sekretaris Kelurahan

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat;
- pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kesekretariatan Kelurahan;
- pelaksanaan administrasi keuangan Kelurahan;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kelurahan;
- pelaksanaan administrasi dan penatausahaan barang milik daerah Kelurahan;
- pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kelurahan;
- pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Kelurahan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kelurahan;
- pelaksanaan administrasi umum Kelurahan;
- pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kelurahan;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kelurahan;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kelurahan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan di lingkungan Kelurahan;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kelurahan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kelurahan;
- pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan survei kepuasan masyarakat/pelanggan;
- menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sekretariat;
- menyiapkan fasilitasi konsep kebijakan dan kegiatan pelayanan publik;

- menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
- menyiapkan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pembangunan Kelurahan

Seksi Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan;
- menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
- menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;

- Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan Karang Taruna;
- menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
- menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan;

- menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
- menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
- menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga; y. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
- menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
- menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
- menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup; ee. menyiapkan kegiatan pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
- menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga;
- menyiapkan kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Sosial, Pangan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi dan Usaha Mikro, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan

Kesejahteraan Sosial; oo. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; rr. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
- menyiapkan kegiatan administrasi dan fasilitasi di bidang pertanahan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kelurahan baik statis maupun dinamis;
- menyiapkan kegiatan penyusunan profil kelurahan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;

- menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan;
- peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
- menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Wali Kota;
- menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga

masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;

- menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- menyiapkan kegiatan program pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
- menyiapkan kegiatan penelitian/pengamatan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku;
- menyiapkan kegiatan pertimbangan legalitas dan izin keramaian yang berhubungan dengan ketertiban umum serta kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang menyangkut ketertiban wilayah;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam mentaati peraturan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan menyelenggarakan perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penanggulangan akibat bencana;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan anggota linmas dan membuat laporan anggota linmas;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat dan pos keamanan lingkungan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak remaja d an penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat addiktif dan bahan berbahaya;

- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Semarang Timur

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Kecamatan Semarang Timur di klasifikasikan ke dalam. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Semarang Timur

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD		1			1
2	SMP Sederajat	1		1		2
3	SMA Sederajat	7	2	16	2	27
4	D3	5	2	1		8
5	S1	30	21	1	2	54
6	S2	2	7			9
7	S3					
JUMLAH		45	33	19	4	101

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 101 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Semarang Timur

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	2	6
2	Golongan III	29	24	53
3	Golongan IV	0	2	2
JUMLAH		33	28	61

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Semarang Timur berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Kecamatan Semarang Timur

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	96	2010	jl. Cilasari Dlm IV	Pakai	30/4/2007	5	Rumah Dinas Kel Kemijen	Pembelian	20.200.000	
2	Tanah Lapangan Bola Volly	120	2015	Jl Kp Jatimulyo RT 004 RW 005	Pakai			Lapangan Bola Voli	Pembelian	188.760.000	
3	Tanah Lapangan Bola Volly	20	2015	kp jatimulyo rt 004 rw 005	Pakai			lapangan bola voly	Pembelian	31.460.000	
4	Tanah Lapangan Bola Volly	27	2015	kp jatimulyo rt 004 rw 005	Pakai			tanah lapangan bola voly	Pembelian	42.471.000	
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1000	1945	Kp. SLAMET	Pakai			RUMDIN BALAI MCK	Pembelian	614.000.000	
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	153	1979	BUBUDAN	Pakai	29/3/1997	12	RUMAH DINAS	Pembelian	195.075.000	
7	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat	169	2011	Jl. Rejosari VII A	Pakai	8/6/2007	24	Taman Kanak-kanak	Pembelian	187.000.000	
8	Rumah Dinas	69	2011	Jl. Kp. Utri	Pakai	30/4/2007	5	Rumah dinas lurah	Pembelian	63.500.000	
9	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	220	2011	Jl. Tirtoyoso III	Pakai	30/4/2007	14	Balai RW	Pembelian	274.000.000	
10	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	62	2011	Jl. Kanalsari Barat VIII	Pakai	30/4/2007	15	Balai	Pembelian	36.000.000	
11	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	82	2011	Jl. Purwosari Raya	Pakai	30/4/2007	18	balai RW	Pembelian	323.000.000	
12	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	123	2011	Jl Rejosari VII A	Pakai	8/1/2007	25	Balai RW	Pembelian	148.000.000	
13	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	24	2011	Jl. kanalsari Barat III	Pakai	30/4/2007	22	Posyandu	Pembelian	14.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
14	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	19	2011	Jl. Pancakarya Block 53	Pakai	30/4/2007	20	Posyandu	Pembelian	13.000.000	
15	Tanah Bangunan Olah Raga	142	2011	Jl. Kridangga Dalam	Pakai	30/4/2007	17	Lapangan	Pembelian	107.000.000	
16	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	1355	2011	Jl. rejomulyo III	Pakai	30/4/2007	23	Lapangan olahraga RW V	Pembelian	1.284.000.000	
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	145	1983	KARANGSANA	Pakai	29/3/1997	11	KANTOR ,BALAI SARIREJO	Pembelian	184.875.000	
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	71	1985	JL BATIK GENDONG 258	Pakai		25	Eks. Rumdin Lurah Widoharjo	Pembelian	4.375.000	
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1096	1988	JL. R.Patah 176	Pakai		26	BALAI KEL REJOMULYO	Pembelian	23.500.000	
20	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	417	2010	JL.BARITO	Pakai	30/4/2007	21	TAMAN barito	Pembelian	127.000.000	
21	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	108	2010	JLREJOSARIGUMUK A	Pakai	30/4/2007	16	BALAI RW VI	Pembelian	138.200.000	
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1096	1988	RADEN PATAH No. 176	Pakai		26	KANTOR KEL REJOMULYO	Pembelian	31.500.000	
23	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan	4500	2009	Jl. Barito	Pakai			PKL Barito	Pembelian	2.925.100.000	
24	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan	600	2009	Jl. Citandui	Pakai			PKL Citandui	Pembelian	375.000.000	
25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	71	1988	Jl. R. Patah 176A	Pakai		25	Rumdin	Pembelian	9.375.000	
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1376	2003	jl. Barito no. 5	Pakai		18	Kantor Kecamatan Smg Tmr	Pembelian	2.252.500.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	165	2003	JL. BRONDONGAN 152 A	Pakai		3	Balai kel kb agung	Pembelian	90.100.000	
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	66	2003	JL.PEDERESAN KECIL	Pakai		4	BALAI RW	Pembelian	39.000.000	
29	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	162	2009	jl. Cimandiri IX	Pakai		28	P0SYANDU	Pembelian	98.800.000	
30	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	79	2009	JL CIMANDIRI IX	Pakai		28	KANTOR BKM	Pembelian	57.500.000	
31	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	297	2009	JL. PESANGGRAHAN RAYA	Pakai	30/4/2007	3	POSYANDU	Pembelian	214.000.000	
32	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan(Sklh)	425	2009	JL.CILIWUNG II	Pakai	30/4/2007	27	BALAI RW.M.HARJO	Pembelian	299.600.000	
33	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	77	2009	PEDERESAN BESAR 25	Pakai			POSYANDU	Pembelian	55.900.000	
34	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	154	1989	JL. R PATAH 176	Pakai			Taman	Pembelian	32.250.000	
35	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	310	2003	Jl. Sedane	Pakai	30/4/2007	11	Taman	Pembelian	74.900.000	
36	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	131	2003	Jl. Sedane	Pakai	30/4/2007	10	Taman	Pembelian	48.000.000	
37	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	353	2003	Jl. Senjoyo	Pakai	30/4/2007	12	Taman	Pembelian	80.500.000	
38	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	241	2003	Jl. Serayu DLM	Pakai	30/4/2007	13	Taman	Pembelian	26.100.000	
39	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	120	2003	Jl. Barito	Pakai	30/4/2007	31	Taman	Pembelian	107.300.000	
40	Tanah Untuk Bangunan Pangolahan Limbah	200	2009	Jl. Barito	Pakai			TPA	Pembelian	130.000.000	
41	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	941		JL. CITANDUI RAYA III			28	KANTOR KEL MLATIHARJ		671.500.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
			2003		Pakai			O	Pembelian		
42	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	146	2007	Jl. Cilosari RT. 02 / 02	Pakai	30/4/2007	17	Gedung PKK	Pembelian	84.500.000	
43	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	496	2003	Jl. Barito	Pakai	30/4/2007	24	Taman BARITO	Pembelian	501.500.000	
44	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	62	2003	Jl. Halmahera II	Pakai	30/4/2007	20	Taman	Pembelian	50.100.000	
45	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1254	2003	JL. KRIDANGGA RAYA 1	Pakai		13	BALAI,KAN TOR REJOSARI	Pembelian	271.500.000	
46	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1046	2003	jl. Hawa Raya 9A	Pakai		19	Kantor kelurahan	Pembelian	1.543.200.000	
47	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	940	2007	JL. PANCAKARYA blok 53	Pakai	30/4/2007	19	balai serba guna	Pembelian	410.600.000	
48	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1017	2009	jl. Krakatau VIII/8	Pakai		7	KANTOR BKK SMG TMR	Pembelian	1.342.900.000	
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	138	2009	Jl. Mlatiharjo Raya no. 4	Pakai	30/4/2007	2	Tanah LPMK	Pembelian	101.000.000	
50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120	2009	JL UTRI 11	Pakai			KANTOR KELURAHA N KB AGUNG	Pembelian	85.300.000	
51	Tanah Bangunan Balai Nikah	117	2003	Jl. Cilosari I	Pakai	30/4/2007	18	KUA	Pembelian	71.000.000	
52	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	71	2003	Jl. Halmahera II	Pakai	30/4/2007	21	Taman	Pembelian	53.100.000	
53	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	111	2003	Jl. Halmahera Raya	Pakai	30/4/2007	28	Taman HALMAHERA RAYA	Pembelian	93.300.000	
54	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	155	2003	Jl. Halmahera Raya	Pakai		27	Taman	Pembelian	148.600.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
55	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	60	2003	jl halmahera raya	Pakai	30/4/2007	29	taman	Pembelian	104.900.000	
56	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	166	2003	jl.hasil raya	Pakai	30/4/2007	22	taman	Pembelian	60.000.000	
57	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	97	2003	Jl. Hawa III	Pakai	30/4/2007	26	Taman	Pembelian	40.000.000	
58	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	97	2003	jl.hawa III	Pakai	30/4/2007	25	taman	Pembelian	45.000.000	
59	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	630	2003	Jl. Nias Raya	Pakai	29/11/2000	10	Taman	Pembelian	517.000.000	
60	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1741	2003	Jl. Taman Maluku	Pakai	22/3/2001	11	Taman	Pembelian	1.179.100.000	
61	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	599	2003	Jl. HAWA	Pakai	29/11/2000	9	taman MALUKU I	Pembelian	197.263.000	
62	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	464	2003	Jl. Taman Irian	Pakai	30/4/2007	23	taman	Pembelian	223.000.000	
63	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	49	2003	Jl. Hasil Raya	Pakai	30/4/2007	32	Taman	Pembelian	23.000.000	
64	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	90	2007	Kp. Kepatihan	Pakai	30/4/2007	24	Taman	Pembelian	5.075.000	
65	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	69	2007	Kp. Batik Krajan	Pakai	30/4/2007	23	Taman	Pembelian	8.630.000	
66	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	169	2009	Jl. Citarum RAYA	Pakai	30/4/2007	5	taman	Pembelian	155.300.000	
67	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1787	2009	Jl. Progo I	Pakai	30/4/2007	6	Taman	Pembelian	960.400.000	
68	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	84	2009	Jl. Taman Serang A	Pakai	30/4/2007	14	Taman	Pembelian	85.700.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
69	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	465	2009	Jl. Taman Serang II	Pakai		16	Taman	Pembelian	65.100.000	
70	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	440	2009	Jl. Taman Serang I	Pakai		14	taman	Pembelian	65.100.000	
71	Tanah Bangunan Olah Raga	108	1993	Kp. Baris	Pakai			Lapangan vooly	Pembelian	66.312.000	
72	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	527	1993	jl.barito	Pakai		30	kantor koramil	Pembelian	84.320.000	
73	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	200	2009	jl.taman serayu B	Pakai			taman	Pembelian	65.100.000	
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	498	2009	JL CITANDUI SLT no. 30	Pakai	4/7/2007	19	KANTOR KEL BUGANGAN	Pembelian	370.500.000	
75	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	147	2010	JL. CIMANDIRI X	Pakai		28	RUMAH DINAS KEL MLATIHARJO	Pembelian	88.700.000	
76	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	181	2010	jl. CIMANDIRI IX	Pakai	30/4/2007	24	BALAI KEL MLATIHARJO	Pembelian	427.600.000	
77	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	168	2010	jl. Kridangga 1	Pakai		13	Rumah Dinas	Pembelian	118.700.000	
78	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan(Sklh)	153	1985	JL. BATIK GENDONG 258	Pakai		22	EKS KANTOR KEL REJOMULYO	Pembelian	6.300.000	
79	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	350	2011	Jl. Penjaringan I, RT.03/I Kemijen	Pakai		9	Kantor Kelurahan Kemijen	Pembelian	87.000.000	
80	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih	100	1980	LASIPIN	Pakai			MCK,PAM,P OS	Pembelian	46.400.000	
81	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	908	2011	Jl. Mlatiharjo Raya No. 16 RT.02 / VIII	Pakai		7	Kantor Kelurahan	Pembelian	699.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
82	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	393	2015	kp.baris 305	Pakai		15		Pembelian	402.366.200	
83	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	84	1945	YUSUF	Pakai		14	MUSHOLA	Pembelian	94.770.000	

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Semarang Timur

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja LainnyaSemi Permanen	B	4	Jl. Citandui Raya		Tanah Milik Pemda	Pembelian	4.000.000
2	Bangunan Gedung KramatoriumPermanen	B	162	Jl.Karangsana 25		Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.334.300
3	Bangunan Gedung KramatoriumPermanen	B	360	Jl.Citandui Raya III / 2		Tanah Milik Pemda	Pembelian	432.000.000
4	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	71	jl. Batik Gendong 258		Tanah Milik Pemda	Pembelian	126.300.000
5	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	153	jl. batik gendong 258		Tanah Milik Pemda	Pembelian	313.050.000
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	12	JL. R.Patah 176 A		Tanah Milik Pemda	Pembelian	28.000.000
7	Mesjid Bersejarah	B	16	jl. R.Patah 176 A		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.000.000
8	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	428	jl. R. Patah 176 A		Tanah Milik Pemda	Pembelian	414.000.000
9	Bangunan Gedung KantorPermanen	B	300	jl. Citandui raya III/2		Tanah Milik Pemda	Pembelian	397.398.970
10	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	96	jl. Cimandiri X		Tanah Milik Pemda	Pembelian	117.600.000
11	Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya Semi Permanen	B	8	jl. Citandui raya III/2		Tanah Milik Pemda	Pembelian	8.000.000
12	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	172	jl. Barito no 5		Tanah Milik Pemda	Pembelian	205.430.000
13	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	162	jl. Bubudan 9		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	183.600.000
14	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	240	jl. Kridangga I		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	288.000.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
15	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	247	jl. Baris		Tanah Milik Pemda	Pembelian	190.000.000
16	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	120	jl. Mlatiharjo ry 16		Tanah Milik Pemda	Pembelian	120.000.000
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	80	Jl. Kr. Kebon Utara		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.300.000
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	45	Jl. Sidorejo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.500.000
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	3	Jl. Ligu Tengah		Tanah Milik Pemda	Pembelian	4.500.000
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	12	Jl. Sidorejo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.000.000
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	9	Jl. Leduwi		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.000.000
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	5	Jl. Kp. Tiber		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.000.000
23	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	75	Jl. Dargo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.000.000
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	5	Jl. Kr. Kojo Utara		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.000.000
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	5	Jl. Ligu Utara		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.000.000
26	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	45	JL. Mlatiharjo ry 16		Tanah Milik Pemda	Pembelian	45.000.000
27	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	77	JL. Slamet		Tanah Milik Pemda	Pembelian	138.600.000
28	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	45	JL. Slamet		Tanah Milik Pemda	Pembelian	69.833.300

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
29	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	4	Jl. Karangsana		Tanah Milik Pemda	Pembelian	4.000.000
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	6	Jl. Petelan Utara		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.000.000
31	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	6	Jl. Ligu Selatan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.500.000
32	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	24	jl. Barito no 5		Tanah Milik Pemda	Pembelian	43.200.000
33	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	45	jl. R.Patah 176 A		Tanah Milik Pemda	Pembelian	145.000.000
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	9	Jl. Gendong Saluran		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.000.000
35	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	45	Jl. Sidorejo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.000.000
36	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	30	jl. Mlatiharjo raya 16		Tanah Milik Pemda	Pembelian	11.500.000
37	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	90	jl. mlatiharjo ry 16		Tanah Milik Pemda	Pembelian	29.200.000
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	105	jl. Penjaringan I		Tanah Milik Pemda	Pembelian	337.107.000
39	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	113	jl. Mlatiharjo raya 4		Tanah Milik Pemda	Pembelian	86.700.000
40	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	60	jl. utri no.11		Tanah Milik Pemda	Pembelian	64.992.860
41	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	154	jl. Pederesan bsr 25		Tanah Milik Pemda	Pembelian	124.300.000
42	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	54	JL. Pederesan kcl		Tanah Milik Pemda	Pembelian	32.900.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
43	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	216	jl. Brondongan 152 A		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	173.700.000
44	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	45	jl. citandui slt 30		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	44.500.000
45	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	98	jl. Citandui Slt 30		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	103.300.000
46	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	96	JL.Ciliwung II		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	32.700.000
47	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	153	jl. Kridangga I		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	165.100.000
48	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	KB	375	jl. Pancakarya 65		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	248.200.000
49	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	270	jl. Hawa raya 9A		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	217.860.390
50	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	72	jl. Hawa raya 9A		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	92.530.500
51	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	34	Jl. Pesanggrahan		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	68.300.000
52	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	96	Jl. Cilosari RT. 02 / 02		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	57.900.000
53	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	216	jl. Citandui Slt 30		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	271.283.380
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	900	jl. Mlatiharjo ry 16		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	48.765.360
55	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B		jl. mlatiharjo ry 16		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	48.768.360
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B		Jl. Citandui Raya		Tanah Milik Pemda	Pembel ian	39.726.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
57	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	68	Jl. Indragiri		Tanah Milik Pemda	Pembelian	90.400.000
58	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	96	Jl. Cimandiri IX		Tanah Milik Pemda	Pembelian	32.700.000
59	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	24	Jl. Cimandiri X		Tanah Milik Pemda	Pembelian	36.900.000
60	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	B	15	Jl. Kridangga I		Tanah Milik Pemda	Pembelian	9.800.000
61	Bangunan gedung Kantor Permanen	B		Gedung Kecamatan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	45.835.000
62	Bangunan gedung Kramatorium Permanen	B	54	jl. Cilosari Dlm IV		Tanah Milik Pemda	Pembelian	68.698.390
63	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	KB		jl. Cilosari Dlm IV		Tanah Milik Pemda	Pembelian	107.839.200
64	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	KB		JL.BARITO NO 5		Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.738.000
65	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	B	12	kel kemijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	20.000.000
66	Lain-lain	B	272	Jl. Utri No 11		Tanah Milik Pemda	Pembelian	643.032.950
67	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	B	498	JL CITANDUI SELATAN NO. 36		Tanah Milik Pemda	Pembelian	149.170.000
68	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Rejomulyo			Pembelian	149.003.000
69	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Mlatibaru			Pembelian	43.027.700
70	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Kebon Agung			Pembelian	149.217.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
71	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Rejosari			Pembelian	149.098.000
72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kelurahan karang Turi			Pembelian	99.332.000
73	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kl. Mlatiharjo			Pembelian	49.617.000
74	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel Sarirejo			Pembelian	24.608.000
75	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Kebon Agung			Pembelian	99.013.000
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Rejomulyo			Pembelian	25.615.000
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	200	Jl.Barito No 5			Pembelian	37.026.000
78	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	14	Jl.Barito No 5			Pembelian	122.613.000
79	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Sarirejo			Pembelian	28.339.850
80	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Sarirejo			Pembelian	22.765.150
81	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel.Rejosari			Pembelian	46.634.500
82	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	20	Kelurahan Karangtempel			Pembelian	48.332.500
83	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	20	Kelurahan Rejomulyo			Pembelian	48.332.500
84	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Sarirejo			Pembelian	24.838.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
85	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Sarirejo			Pembelian	58.283.500
86	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	14	Kelurahan Karangturi			Pembelian	48.223.500
87	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	14	Kelurahan Karangtempel			Pembelian	48.223.500
88	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kampung Tematik Kel. Sarirejo			Pembelian	22.915.500
89	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Kp. Grogolan RT. 01 RW. 03 Kel. Rejomulyo , Rejomulyo , Smg Timur			Pembelian	38.563.000
90	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Jl. Ngestimulyo RT. 03 RW. 03 Kel. Mlatibaru , Mlatibaru , Smg Timur			Pembelian	36.380.300
91	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	150	Jl. Pesanggrahan RT. 10 RW. 02 Kel. Mlatibaru , Mlatibaru , Smg Timur			Pembelian	44.327.000
92	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	150	JL. Cimandiri X RT. 01 RW. 02 Kel. Mlatiharjo , Mlatiharjo , Smg Timur			Pembelian	53.267.500
93	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Jl. Petelan Utara Rt. 02 RW. 08 Kel. Sarirejo , Sarirejo , Smg Timur			Pembelian	24.569.000
94	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Jl. Gendong Utara RT.05 RW. 06 Kel. Sarirejo , Sarirejo , Smg Timur			Pembelian	15.954.400
95	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	60	Jl. Karangkojo Utara RT. 01 RW. 08 Kel. Sarirejo , Sarirejo , Smg Timur			Pembelian	24.909.400
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	60	Kp. Rahayu RT. 01 RW.08 Kel. Karangturi , Karangturi , Smg Timur			Pembelian	18.975.550
97	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	60	Jl. Ligu Selatan RT> 05 RW. 04 Kel. Sarirejo , Sarirejo , Smg Timur			Pembelian	17.723.300
98	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	150	Jl. Kridangga Raya RT.01 RW. 05 Kel. Rejosari , Rejosari , Smg Timur			Pembelian	47.830.500

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
99	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	150	Jl. Manisharjo Raya RT. 04 RW. 07 Kel. Rejomulyo , Rejomulyo , Smg Timur			Pembelian	69.496.000
100	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Kp. Gedongsari RT. 05 RW. 03 Kel. Rejomulyo , Rejomulyo , Smg Timur			Pembelian	37.544.000
101	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	60	Kp. Jatimulyo RT. 04 RW. 05 Kel. Rejomulyo , Rejomulyo , Smg Timur			Pembelian	10.560.000
102	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Kp. Utri RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kebonagung , Kebonagung , Smg Timur			Pembelian	33.984.000
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	300	Kp. Slamet RT. 01 RW.03 Kelurahan Karangturi , Karangturi , Smg Timur			Pembelian	99.332.000
104	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	60	Kp. Dargo Dalam RT. 04 RW. 04 Kel.Kebonagung ,Kebonagung , Smg Timur			Pembelian	21.527.000
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	150	Kp. Pandean Tamanharjo Kel. Kebonagung , Kebonagung , Smg Timur			Pembelian	45.545.000
106	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	240	Jl.Musi Raya RT. 02 RW. 04 Kel. Bugangan , Bugangan , Smg Timur			Pembelian	73.231.000
107	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Jl. Gendong Utara RT. 05 RW. 06 Kel. Sarirejo , Sarirejo , Smg Timur			Pembelian	24.838.000
108	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	180	Jl. Kanalsari Barat VIII RT. 09 RW. 09 Kel. Rejosari , Rejosari , Smg Timur			Pembelian	64.597.500
109	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	30	Jl. Rejosari Gumuk RT. 04 RW. 11 Kel. Rejosari , Rejosari , Smg Timur			Pembelian	12.848.500
110	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	150	Kp. Suburan, Kp. Utri Kelurahan Kebonagung , Kebonagung , Smg Timur			Pembelian	51.192.700

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
111	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Jl. Petelan Selatan RT. 01 RW. 07 Kel. Sarirejo , Sarirejo , Smg Timur			Pembelian	26.177.400
112	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Jl. Sidodadi Barat RT. 03 RW. 02 Kel. Karangturi , Karangturi , Smg Timur			Pembelian	25.924.800
113	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	300	Jl. Karangasem RW. 09 Kel.Mlatibaru , Mlatibaru , Smg Timur			Pembelian	99.063.000
114	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	150	Jl. Indragiri Utara RT.03 RW. 08 Kel. Mlatibaru , Mlatibaru , Smg Timur			Pembelian	48.774.000
115	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	90	Jl. Petelan Tengah RT. 04 RW. 07 Kel. Sarirejo , Sarirejo , Smg Timur			Pembelian	24.721.000
116	Lain-lain	B	3995	Jl Barito No 5		Tanah Milik Pemda	Pembelian	198.586.000
117	Lain-lain	B	9	Kp.Batik Widoharjo RT 07 RW 01 Kelurahan Rejomulyo			Pembelian	39.303.000
118	Lain-lain	B	9	Kp.Grogolan RT 01 RW 03 Kelurahan Rejomulyo			Pembelian	38.563.000
119	Lain-lain	B	15	Kp.Rahayu RT 01 RW 08 Kelurahan Karangturi			Pembelian	40.543.450
120	Lain-lain	B	15	Jl. Gendong Utara RT 05 RW 06 Kelurahan Sarirejo			Pembelian	15.954.400
121	Lain-lain	B		Jl. Karangkojo Utara RT 01 RW 08 Kelurahan Sarirejo			Pembelian	24.909.400
122	Lain-lain	B	28	Jl. Ligu Selatan RT 05 RW 04 Kelurahan Sarirejo			Pembelian	17.723.700
123	Lain-lain	B	28	Jl. Manisharjo Raya RT 04 RW 07 Kelurahan Rejomulyo			Pembelian	69.496.000
124	Lain-lain	B		Kp. Dargo Dalam RT 04 RW 04 Kelurahan Kebonagung			Pembelian	21.527.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
125	Lain-lain	B	20	Kp. Pandean Tamanharjo Kelurahan Kebonagung			Pembelian	45.545.000
126	Lain-lain	B	20	Kp. Suburan, Kp. Utri Kelurahan Kebonagung			Pembelian	51.192.700
127	Lain-lain	B	16	Jl.Tirtoyoso RT 05, RW 12 Kelurahan Rejosari			Pembelian	33.124.300
128	Lain-lain	B	6	Jl. Indragiri Utara RT 03 RW 08 Kelurahan Mlatibaru			Pembelian	48.774.000
129	Lain-lain	B	6	Jl. Petelan Tengah RT 04 RW 07 Kelurahan Sarirejo			Pembelian	24.721.000
130	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	B	20	Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur			Pembelian	82.638.150
131	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	B	20	Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur			Pembelian	86.794.620
132	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Tembus Antara RT 04 RW 05 Jl.Margorejo Barat RT 02 RW 05 Kelurahan Kemijen			Pembelian	78.184.390
133	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Kp.Blusuk RT 01 RW 11 Kelurahan Kemijen			Pembelian	101.107.390
134	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl.Citandui Selatan ke Jalan Indragiri RT 07 RW 03 ke RW 04 RT 12 Kelurahan Bugangan			Pembelian	177.622.390
135	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Citarum dan Citandui Selatan I RT 07 RW 05 Kelurahan Mlatiharjo			Pembelian	174.28.,000
136	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Karangtempel Utara RT 01 RW 04			Pembelian	24.502.390
137	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl.Raden Patah No.176A RT 04 RW 06 Kelurahan Rejomulyo			Pembelian	157.353.790
138	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl.Sumbawa 1 RT 08 RW 04			Pembelian	127.335.390

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
139	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl.Mlatiharjo Perbalan RT 01 RW 03 Kelurahan Mlatibaru			Pembelian	78.100.390
140	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		RT. 05 RW.03 dan RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kebonagung			Pembelian	156.479.790
141	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kp. Slamet RT. 01 RW. 03 dan Kp. Lasipin RT.03 RW. 04 RT 01 RW 03			Pembelian	149.625.000
142	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kp. Slamet RT. 01 RW. 03 dan Kp. Lasipin RT.03 RW. 04 RT 01 RW 03			Pembelian	168.453.000
143	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl.Krakatau III RT 03 RW 01			Pembelian	83.042.390
144	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl.Hiri III RT 02 RW 03			Pembelian	78.089.390
145	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl.Mlatiharjo Perbalan RT 01 RW 03 Kelurahan Mlatibaru			Pembelian	78.304.390
146	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl.Mlatiharjo Tengah : RT 01 / RW 08 - RT 06 / RW 07 & Jl.Mlatiharjo Tengah : RT 01 / RW 07 Kelurahan Mlatibaru			Pembelian	174.224.000
147	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl.Karangsana RT 04 RW 04			Pembelian	73.154.390
148	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Kp.Petelan Utara RT 07 RW 08			Pembelian	73.055.390
149	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	500	Kp.Slamet RT 01 RW 03 , RW 03 , Semarang Timur			Pembelian	150.176.100
150	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	600	Jl.Raden Patah No.176A RT 04 RW 06 Kelurahan Rejomulyo , Karangtempel , Semarang Timur			Pembelian	157.353.790
151	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	900	Jl.Mlatiharjo Perbalan RT 01 RW 03 Kelurahan Mlatibaru , Mlatiharjo ,Semarang Timur			Pembelian	78.304.390
152	Lain-lain	B		Jl. Hiri II RT. 05 RW. III			Pembelian	35.942.390

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asalusul	Harga
153	Lain-lain	B		Jl.Bugangan V RT 05 RW 01			Pembelian	49.016.070
154	Lain-lain	B		Jl.Bugangan V RT 05 RW 01			Pembelian	48.204.020
155	Lain-lain	B		Jl. Hiri II RT. 05 RW. III			Pembelian	34.683.470
156	Lain-lain	B		Jl. Hiri II RT. 05 RW. III			Pembelian	23.917.920
157	Pagar	B		Kp. Slamet RT. 01 RW. III			Pembelian	22.811.400
158	Lain-lain	B		Jl. Taman Irian RT. 08 RW. III			Pembelian	17.868.240
159	Lain-lain	B		Jl.Bugangan V RT 05 RW 01			Pembelian	13.785.920
160	Lain-lain	B		Kp. Slamet RT. 01 RW. III			Pembelian	23.553.540
161	Lain-lain	B		Kp. Slamet RT. 01 RW. III			Pembelian	18.929.780
162	Lain-lain	B		Jl. Citandui Selatan RW. III Kel. Bugangan			Pembelian	197.516.000

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Semarang Timur

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Semarang Timur.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Semarang Timur

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Semarang Timur berdasarkan bidang urusan kewilayahan terbagi menjadi capaian kinerja urusan kewilayahan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kec. Semarang Timur pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Indikator Tujuan																
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	N/A	87,00	92,80	93,00	94,60	N/A	90,68	92,80	93,07	95,03	N/A	104,23%	100,00%	100,08%	100,46%
2.	Indikator Sasaran																
a	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	100,00%	-	-
b	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
c	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	N/A	95,00%	97,00%	98,00%	98,00%	N/A	95,00%	97,00%	98,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
d	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	40,00%	45,00%	N/A	N/A	N/A	40,00%	45,00%	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A
e	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	81,68%	83,36%	85,04	86,72%	-	81,68%	83,36%	85,00%	86,00%	-	100,00%	100,00%	99,95%	99,17%
f	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	-	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	87,00%	90,000%	92,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	105,26%
3	**Indikator Program :**																
a.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
b.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
c.	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
d	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persen	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
e	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
g	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	Persen	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-
h	Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan RT	Persen	88 %	90 %	-	-	-	80 %	80 %	-	-	-	90,91%	88,89%	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kec. Semarang Timur pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
i	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Angka	83	85	-	-	-	83	85	-	-	-	100%	100%	-	-	-
j	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	Angka	2 Kelurahan	0	-	-	-	N/A	0	-	-	-	0		-	-	-
k	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan Kelurahan)	Angka	480	480	-	-	-	240	440	-	-	-	50%	91,67%	-	-	-
l	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	Persen	53%	55 %	-	-	-	52%	55 %	-	-	-	98,11%	100%	-	-	-
m	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	Persen	93,81%	95,00 %	-	-	-	92,08%	93,22 %	-	-	-	98,16%	98,13%	-	-	-
n	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	Persen	99,04%	99,50	-	-	-	99,00%	99,07 %	-	-	-	99,96%	99,57%	-	-	-
o	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar PATEN	Persen	77 % (2 Kelurahan)	55 %	-	-	-	80% (8 Kelurahan)	55 %	-	-	-	-	-	-	-	-
p	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	Angka	19.000	19.000	-	-	-	15.612	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
q	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	Angka	10 Kelurahan	10	-	-	-	9 Kelurahan	10	-	-	-	90%	100%	-	-	-
r	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	100 %	100 %	-	-	-	70 %	90 %	-	-	-	70%	90%	-	-	-
s	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan	Persen	94,31 %	80 %	-	-	-	80%	87 %	-	-	-	84,83%	108,75%	-	-	-
t	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persen	-	90,84%	91	-	-	-	85%	92,66	-	-	-	93,57%	101,82%	-	-
U	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	-	95,00	97	-	-	-	95	97	-	-	-	100%	102,11%	-	-
V	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	0,00	10	-	-	-	0,00	10	-	-	-	0%	100%	-	-
w	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	-	85	90	-	-	-	85	90	-	-	-	100%	100%	-	-
4	**Indikator Lainnya**																

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kec. Semarang Timur pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
a	Tingkat Partisipasi Masyarakat	-	-	90,21%	-	-	-	-	90,21	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	-	-	-	11,14%	10,52%	9,9%	-	-	10,52%	10,52%	9,9%	-	-	-	-	-
c	Nilai AKIP	Angka	64,19	64,19	70,96	76,20	76,30	64,19	64,19	70,96	76,20	76,30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Kecamatan Semarang Timur 2025

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Semarang Timur

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Semarang Timur. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Semarang Timur. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Semarang Timur.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KECAMATAN SEMARANG TIMUR		40.050.821.717	36.196.693.479	41.461.257.190	43.179.097.428	N/A	37,016,420,656	34,018,280,884	39,464,322,119	40.636.341.383	N/A	92.42 %	93.98 %	95.18 %	94,11	40.221.967.454	40.636.341.383
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	347.480.000	0	0	0	0	341.786.556	0	0	0	0	98,36%	0	0	0	0	0	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	211.400.000	0	0	0	0	207.355.256	0	0	0	0	98,09%	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	170.300.000	0	0	0	0	169.796.000	0	0	0	0	99,70%	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	6.059.906.000	0	0	0	0	5.929.335.850	0	0	0	0	97,85%	0	0	0	0	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.840.172.000	0	0	0	0	9.663.435.204	0	0	0	0	98,20%	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	940.607.000	0	0	0	0	916.725.786	0	0	0	0	97,46%	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	224.245.000	0	0	0	0	224.245.000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	347.480.000	0	0	0	0	341.768.556	0	0	0	0	98,36%	0	0	0	0		
Program Peningkatan Intensifikasi PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	10.223.081.415	3.312.618.519	3.059.498.659	3.456.912.962	N/A	9.160.884.074	2.883.309.924	2.814.722.470	3.285.366.304	N/A	89.61 %	87.04 %	92.00 %	95,04 %	5.013.027.889	4.536.070.693
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	15.672.101.006	19.225.640.317	24.604.040.748	24.451.208.950	N/A	15.091.228.904	18.454.209.390	23.856.414.160	22.876.041.469	N/A	96.29 %	95.99 %	96.96 %	93,56 %	20.988.247.755	20.069.473.481
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	293.016.137	33.926.000	65.000.000	38.150.000	N/A	285.050.496	28.448.000	63.071.000	36.895.000	N/A	97.28 %	93.85 %	97.03 %	96,71 %	107.523.034	103.366.124
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	N/A	0	19.750.000	92.200.000	104.900.000	N/A	0	15.099.000	90.788.600	97.445.000	N/A	0 %	76.45 %	98.47 %	92,89 %	72.283.333	67.777.533
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	13.862.623.159	13.604.758.643	13.640.517.783	15.127.925.516	N/A	12.479.257.182	12.637.214.570	12.639.325.889	14.340.593.610	N/A	90.02 %	92.89 %	92.66 %	94,80 %	14.058.956.275	13.024.097.813

Sumber : Kecamatan Semarang Timur

c. Mitra Kecamatan Semarang Timur dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mitra Kecamatan Semarang Timur terbagi dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

1. Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan
   Sebagai mitra langsung di wilayah, kelurahan dan lembaga seperti RT/RW, LPMK, PKK, karang taruna, dan forum anak merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan di tingkat paling bawah. Mereka berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, mendukung pelaksanaan program pembangunan, dan menyampaikan informasi layanan secara cepat dan akurat.
2. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam)
   Kecamatan Semarang Timur menjalin sinergi dengan instansi vertikal seperti Polsek, Koramil, dan KUA dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan pelayanan lintas sektor.
3. Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan
   Sekolah, puskesmas, rumah sakit, masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya menjadi mitra penting dalam pembinaan masyarakat, kampanye kesehatan, serta penguatan nilai-nilai sosial dan moral. Kerja sama dalam program edukasi, imunisasi, dan pemberdayaan remaja turut memperkuat peran kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
4. Pelaku Dunia Usaha dan UMKM
   Dunia usaha, koperasi, dan pelaku UMKM lokal menjadi mitra dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Kecamatan berperan dalam memfasilitasi pelatihan, promosi produk, pengurusan perizinan, serta mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung pembangunan wilayah.

Melalui kemitraan yang solid dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, Kecamatan Semarang Timur mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan menyeluruh. Kemitraan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi dalam mewujudkan Kecamatan Semarang Timur yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Kecamatan Semarang Timur

1. Petasol dari Limbah Sampah Plastik

Dengan adanya Petasol diharapakan bisa membatasi penggunaan barang atau kemasan yang berpotensi menimbulkan sampah, memanfaatkan sampah dengan cara yang tepat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menciptakan inovasi baru untuk mengelola sampah plastik menjadi berbagai macam barang yang bernilai jual tinggi.

2. Geprek Semmur (Gerakan Perempuan Ekonomi Kreatif Semarang Timur)
Inovasi ini memberikan manfaat menginspirasi kepada perempuan-perempuan di wilayah Kecamatan Semarang Timur, sebagai wadah berkumpulnya perempuan -perempuan kreatif di wilayah Kecamatan Semarang Timur, optimalisasi pemanfaatan hasil pelatihan untuk dikembangkan menjadi usaha UMKM di Kecamatan Semarang Timur.

e. Penghargaan Kecamatan Semarang Timur
Juara III Lomba Pokdarwis Tk. Propinsi Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. **Tantangan**

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Semarang Timur sebagai berikut:

1. Pengelolaan Lingkungan
   Mengatasi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan, seperti yang terlihat dengan adanya Bank Sampah.
2. Pelayanan Publik
   Meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan efektif dan efisien.
3. Pengembangan Infrastruktur
   Mengembangkan infrastruktur yang memadai dan mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan jalan, tanggul, jembatan, dan sistem drainase.
4. Konflik Sosial
   Potensi konflik sosial, gangguan keamanan, gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin terjadi di wilayah Kecamatan Semarang Timur

b. **Peluang**

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Semarang Timur untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Pemilahan dan Pengolahan Limbah Plastik
   Pemilahan dan pengolahan limbah plastik yang menghasilkan solar yang dinamakan Petasol. Kegiatan ini bertujuan untuk mengelola sampah agar bisa mengurangi limbah sampah dan bisa dimanfaatkan sebagai bahn bakar, seperti mesin perahu, mesin molen.

2. Pengembangan Teknologi Informasi
   Memanfaatkan teknologi informasi dan keterbukaan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan online.
3. Pengelolaan Banjir dan Rob
   Pengembangan pengelolaan banjir dan rob yang berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur tanggul dan sistem drainase yang efektif, untuk mengurangi risiko banjir dan rob. Mengembangkan penghijauan dan meningkatkan kualitas lingkungan.
4. Meningkatkan kesadaran dan solidaritas masyarakat melalui keterlibatan aktif peran tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas dan membangun perdamaian.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Semarang Timur.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Semarang Timur diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Semarang Timur telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah **“Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan”**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Semarang timur terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **“Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan”**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah **“Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan”**.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Peran Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Semarang Timur seperti LPMK, PKK, Karang Taruna dan RT/RW belum optimal partisipasinya dalam Pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan – kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah dilaksanakan, output dan sasaran kegiatan belum dapat diukur dampaknya di Masyarakat. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan. Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya output dan sasaran dari kegiatan kelembagaan di wilayah Kecamatan Semarang Timur.

b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Semarang Timur masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah, pedagang kaki lima yang berjualan di luar zona yang ditentukan, serta gangguan keamanan lingkungan seperti penertiban PKL dan konflik sosial skala kecil. Minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya personil keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan khususnya di Kelurahan juga menjadi salah satu faktor sulitnya penyelesaian masalah tersebut.

Beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar penentuan permasalahan " Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum " antara lain :

- Sarana dan Prasarana Pendukung

Rasio ketersediaan sarana patroli dan jumlah pos keamanan aktif di wilayah Kecamatan masih sangat minim.

- Partisipasi Masyarakat

Jumlah warga yang berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masih sangat kurang.

- Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban tidak terupdate secara maksimal karena kurangnya peran aktif dari stakeholder terkait.

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Timur;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Timur;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Timur;
b. Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Timur;
c. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
d. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Timur;
e. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Timur;
f. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur;
g. Belum optimalnya partipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Timur;
h. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur;
i. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Timur.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
"Belum Optimalnya Kualitas Kelembagaan, Penyelenggaraan Pelayanan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Timur	Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Timur
		Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Timur
		Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Timur
2	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Timur	Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Timur
		Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur
		Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Timur
		Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Timur
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Timur
3	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur
		Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Timur
		Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur
		Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Timur

Sumber : Kecamatan Semarang Timur 2025

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Kecamatan Semarang Timur dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik di kecamatan yang menyebabkan kurang maksimalnya kualitas layanan dasar kepada masyarakat.
2. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur yang belum merata, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas, responsivitas, serta inovasi pelayanan.
3. Masih lemahnya mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, terutama dalam menangani masalah sosial, kebersihan, dan ketertiban umum.
4. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, baik dalam perencanaan pembangunan, pengawasan program, maupun pengembangan inisiatif pemberdayaan.

5. Minimnya pengembangan sistem informasi dan layanan digital yang dapat menunjang transparansi, efisiensi, dan jangkauan layanan masyarakat secara luas.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Semarang Timur Tahun 2025–2029, perlu dilakukan telaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai salah satu rujukan perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional.

Telaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada tingkat kecamatan, berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional dan mampu merespons isu-isu strategis nasional dan global yang relevan dengan lingkup tugas dan fungsi Kecamatan.

RPJMN 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi "Indonesia Emas 2045" dan sekaligus menjadi tahapan penting dalam menyongsong Indonesia sebagai negara maju. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi

antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dokumen RPJMN tersebut mengangkat sejumlah isu strategis nasional dan global yang harus direspons oleh seluruh pemangku kebijakan, termasuk pemerintah daerah hingga level kecamatan.

Beberapa isu strategis nasional dan global dalam RPJMN 2025–2029 yang relevan dengan lingkup tugas Kecamatan Semarang Timur antara lain:

a. Isu Global yang Relevan
    1. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota
       Pertumbuhan penduduk di perkotaan semakin tinggi, sehingga menimbulkan tekanan terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, dan keterjangkauan layanan publik di tingkat lokal. Hal ini menuntut kecamatan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola wilayah urban secara inklusif dan efisien.
    2. Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0
       Perubahan teknologi global menuntut kecamatan agar beradaptasi dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk sistem pelayanan terpadu, keterbukaan data, dan digitalisasi proses kerja.
    3. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana
       Kecamatan harus responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan risiko bencana, termasuk dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir, dan pemberdayaan masyarakat tangguh bencana.
b. Isu Nasional yang Relevan
    1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
       RPJMN menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kecamatan sebagai ujung tombak

pelayanan administratif harus melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan inovasi pelayanan.

2. Penguatan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Berbasis Wilayah
   Peran kecamatan diperkuat sebagai simpul koordinasi dan fasilitator pembangunan di wilayah kelurahan, termasuk penguatan peran Camat dalam integrasi program lintas OPD di level lokal.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
   Salah satu arah kebijakan RPJMN adalah penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Hal ini menuntut kecamatan untuk menjadi fasilitator yang efektif dalam musyawarah perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi multipihak.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM
   RPJMN juga menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan UMKM dan kewirausahaan lokal. Kecamatan diharapkan mendukung fasilitasi promosi, pelatihan, dan kemitraan UMKM di wilayah masing-masing.

5. Pengendalian Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah
   RPJMN mengarahkan upaya pengurangan kemiskinan berbasis wilayah. Kecamatan memiliki peran penting dalam pendataan masyarakat miskin, pengelolaan program bantuan sosial, dan mendorong program pemberdayaan yang menyasar kelompok rentan.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif."

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada**
Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan,
Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk
mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses

permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di

pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Timur mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif”** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.”**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat” (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Semarang

Timur mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat" (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran "Indeks Pelayanan Publik" (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran "meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang" (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran "Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan" (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah" (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Semarang Timur secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Semarang Timur dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Peranan Kecamatan Semarang Timur dalam Mendukung Pencapaian
Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

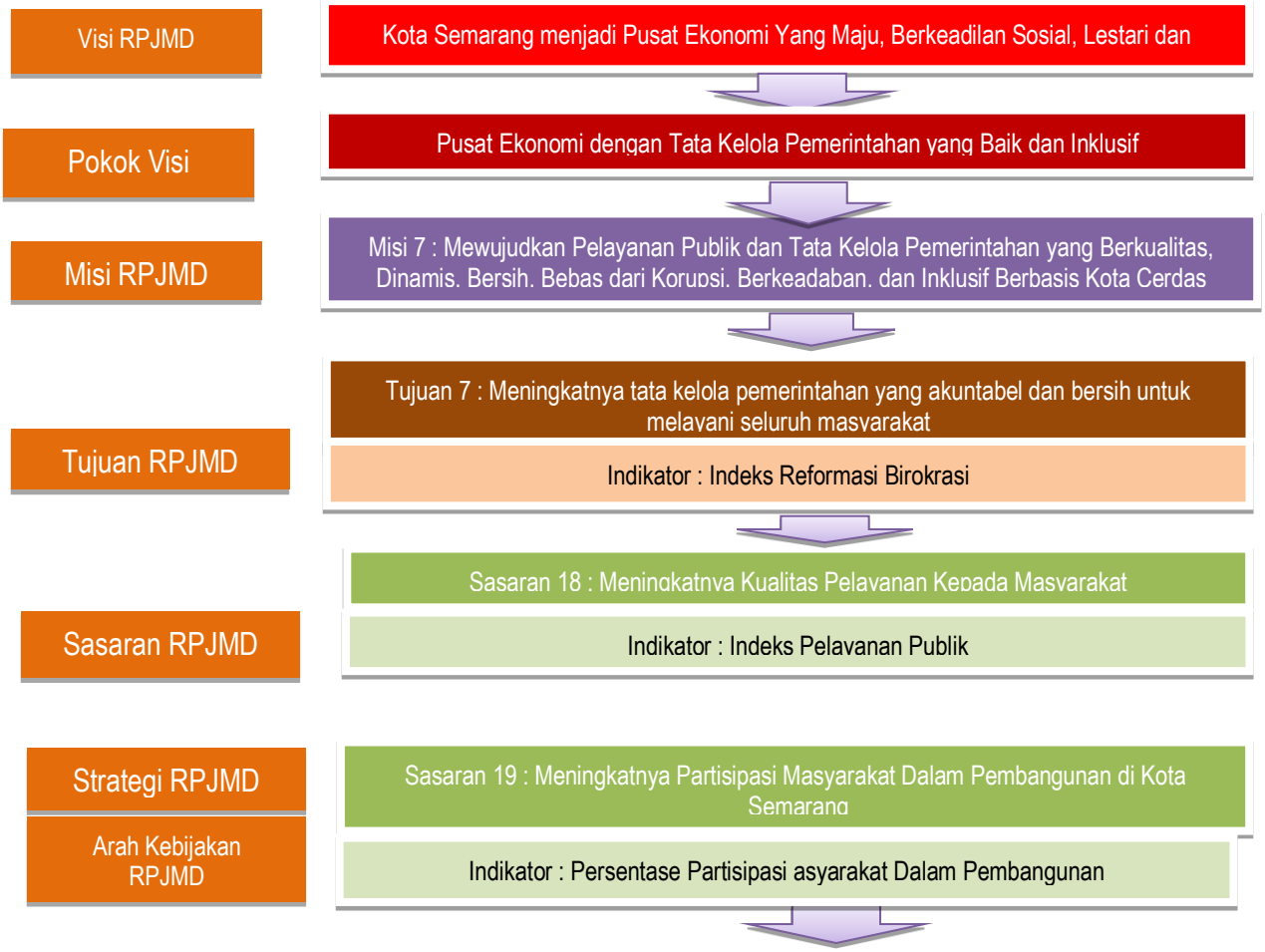

Strategi 7 : Implementasi Reformasi Birokrasi di Seluruh Perangkat Daerah
Arah Kebijakan 33 : Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi
Arah Kebijakan 34 : Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan
Arah Kebijakan 35 : Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, melalui optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan penguatan kapasitas aparatur;
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Peningkatan daya saing ekonomi daerah, melalui pengembangan UMKM, penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi, serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan inklusif;
4. Penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penguatan peran masyarakat dalam pembangunan, dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel;
6. Pemantapan sinergi antarwilayah, antarperangkat daerah, dan antara pemerintah kota dengan stakeholder lainnya, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.

Kecamatan Semarang Timur secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dalam mencapai indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, khususnya dalam:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, melalui penguatan peran Unit Pelayanan Terpadu (UPT) serta peningkatan responsivitas pelayanan administratif kepada warga;
2. Pemberdayaan ekonomi lokal, dengan mendorong pengembangan potensi wilayah seperti sentra industri kecil menengah, pertanian perkotaan, dan kawasan perdagangan;
3. Pelestarian lingkungan hidup, melalui kolaborasi program kampung iklim, penanganan sampah berbasis masyarakat, serta pengawasan pembangunan berbasis tata ruang;
4. Penguatan budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan pembangunan berbasis RW/Kelurahan yang sinergis dengan visi inklusifitas kota.
5. Kecamatan Semarang Timur berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek

pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberi manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender (ARG) diproyeksikan sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Implementasi ARG juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.

6. Sebagai bagian dari Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terha dap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA.
7. Kecamatan Semarang Timur diarahkan sebagai Kecamatan Berdaya yang mampu memperkuat tata kelola pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada optimalisasi potensi lokal, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui penguatan kapasitas aparatur serta kolaborasi multipihak, kecamatan diharapkan menjadi simpul penggerak pembangunan partisipatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
8. Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat terus diperkuat untuk memenuhi 6 layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan. Kecamatan Semarang Timur berupaya mendukung revitalisasi Posyandu agar lebih terintegrasi, inovatif, dan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan berkesinambungan.

9. Kerukunan umat beragama merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif. Kecamatan Semarang Timur memiliki keragaman agama dan keyakinan yang tinggi, sehingga diperlukan penguatan dialog antarumat beragama, fasilitasi kegiatan keagamaan, dan dukungan terhadap forum-forum kerukunan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Upaya ini diarahkan untuk mencegah potensi konflik sosial, memperkuat kohesi sosial, dan membangun budaya toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

10. Selain kerukunan umat beragama, harmonisasi wilayah menjadi isu strategis yang harus terus dijaga. Kecamatan Semarang Timur sebagai kawasan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks menghadapi tantangan berupa potensi gesekan antarwarga, konflik kepentingan lahan, maupun perbedaan aspirasi pembangunan. Untuk itu, penguatan mekanisme mediasi, musyawarah, serta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan wilayah. Upaya harmonisasi ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Dengan peran strategis tersebut, Kecamatan Semarang Timur menjadi simpul penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Kota Semarang yang berorientasi pada pertumbuhan berkeadilan, keberlanjutan lingkungan, serta pelayanan publik yang semakin adaptif terhadap tantangan zaman.

c. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Kecamatan Semarang Timur tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Semarang Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RT RW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Dalam sistem pengembangan wilayah Kota, Kecamatan dikelompokkan dalam BWK yang meliputi:

a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa berskala internasional;
   - pusat pemerintahan Provinsi; dan
   - pusat pemerintahan Kota.

b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pusat pendidikan kepolisian; dan
   - pusat olahraga
c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - transportasi laut;
   - transportasi udara; dan
   - kantor pelayanan pemerintahan Provinsi
d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk, dengan rencana pengembangan fungsi utama berupa industri.
e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Pedurungan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - jasa pertemuan dan pameran.
f. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang, dengan rencana pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi.
g. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perkantoran militer; dan
   - perdagangan dan jasa.
h. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pendidikan tinggi; dan
   - paru-paru Kota.
i. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Semarang Timur dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
   - paru-paru Kota.
j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - industri.

Berdasarkan hasil telaah tata ruang dan rencana wilayah Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur masuk ke dalam wilayah BWK I, dimana telah diatur untuk fokus pengembangan untuk pengembangan fungsi utama perdagangan dan perdagangan dan jasa berskala internasional, pusat pemerintahan Provinsi, pusat pemerintahan Kota. Dengan berada dalam wilayah BWK I Kecamatan Semarang Timur masuk dalam wilayah yang sangat strategis untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan kemasyarakatan lainnya melalui program-program yang akan dituangkan ke dalam renstra 2025-2029. Selain itu, Kecamatan Semarang Timur juga memiliki potensi sebagai pusat lingkungan, pengaturan kawasan perumahan (zonasi kawasan perumahan), pengembangan perdagangan dan infrastruktur penyalur tenaga listrik sebagaimana penjabaran sebagai berikut:

1. Pengembangan fungsi utama masing-masing BWK meliputi :
   a. perdagangan dan jasa berskala internasional;
   b. pusat pemerintahan Provinsi; dan
   c. pusat pemerintahan Kota
2. Pusat pelayanan kota dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan Kota dan/ atau Regional. Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.
3. Pusat lingkungan di BWK I (wilayah Kecamatan Semarang Timur) meliputi
   a. pusat lingkungan I.2 berada di Kelurahan Kemijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlatiharjo, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Bugangan;
   b. pusat lingkungan I.3 berada di Kelurahan Rejosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Karangturi dan Kelurahan Karangtempel;
4. Pengaturan kawasan perumahan perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota.
5. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional/ nasional/ internasional yang berada dalam jangkauan jalan kolektor dan arteri primer.
6. Pengembangan perdagangan dan jasa skala Kota
7. Rencana pengembangan kawasan Pendidikan meliputi peningkatan kualitas kawasan pendidikan tinggi.
8. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan meliputi pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen) diarahkan di kawasan pusat kota.
9. Jaringan jalur kereta api umum meliputi kereta api antar kota, stasiun barang.
10. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
11. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada di Kecamatan Semarang Timur.

12. Jaringan infrastruktur minyak bumi berupa jaringan gas bumi meliputi :
    a. kilang ke konsumen. Jaringan pipa BBM Cepu - Rembang-Pengapon Semarang melewati Kecamatan Semarang Timur
    b. Kepodang- Rembang - Pati - Jepara – Semarang melewati Kecamatan Semarang Timur
13. Air tanah berupa pengaturan pengambilan air tanah pada CAT Semarang – Demak dan CAT Ungaran pembatasan pengambilan air tanah di Kecamatan Semarang Timur, peningkatan dan pengembangan sistem prasarana air permukaan melalui sistem perpipaan di seluruh kecamatan; dan pengembangan pemanfaatan air hujan di seluruh kecamatan.
14. Rencana sistem pengelolaan air limbah meliputi sistem pembuangan air limbah (sewage); dan sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage). Sistem pembuangan air limbah (sewage) pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri di kawasan peruntukan industri di Kecamatan Semarang Timur.
15. Sistem drainase meliputi : a. jaringan primer; b. jaringan sekunder; dan c. jaringan tersier sebagai satu kesatuan sistem drainase meliputi sistem drainase Kecamatan Semarang Timur dengan luas lebih 31.043 (tiga puluh satu ribu empat puluh tiga) hektar meliputi Sub Sistem Banjir Kanal Timur dengan luas kurang lebih 3.705 (tiga ribu tujuh ratus lima) hektar meliputi Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor;
16. Kawasan olahraga meliputi peningkatan Stadion Citarum di Kecamatan Semarang Timur;
17. Kawasan Transportasi
18. Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan industri; dan sentra industri kecil dan menengah. Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar meliputi sentra industri kecil dan menengah Bugangan di Kecamatan Semarang Timur.
19. Kawasan campuran dengan luas kurang lebih 1.116 (seribu seratus enam belas) hektar salah satunya meliputi Kecamatan Semarang Timur.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT RW, Kecamatan Semarang Timur dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT RW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Program Kewilayahan RT RW Kota Semarang yang Relevan untuk Kecamatan Semarang Timur

No	Program Kewilayahan RT RW Kota Semarang	Relevansi bagi Kecamatan Semarang Timur
1	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Mendukung pelayanan perizinan, fasilitasi UMKM, dan pertumbuhan ekonomi lokal
2	Pengembangan kawasan industri dan pergudangan	Memerlukan koordinasi pelayanan administratif dan pengawasan pemanfaatan ruang
3	Peningkatan infrastruktur jalan antar kecamatan (Ngaliyan –Mijen – Semarang Timur)	Memperkuat konektivitas layanan publik dan mobilitas warga antarwilayah
4	Penataan kawasan permukiman dan pemukiman campuran	Terkait layanan kependudukan, pengelolaan kebersihan, dan ketertiban lingkungan
5	Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik	Mendorong peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan ruang sosial
6	Pengembangan sistem transportasi kawasan barat kota	Menjadi dasar perencanaan pelayanan pendukung moda transportasi umum dan pengaturan lalu lintas

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Melalui KLHS, diharapkan arah pembangunan daerah lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan daya dukung serta daya tampung ekosistem.

Telaahan KLHS dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan hidup dalam ruang lingkup pelayanan kecamatan, dengan mempedomani arah kebijakan dari dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029. Namun, sampai dengan dokumen ini disusun, Kecamatan Semarang Timur belum dapat mengidentifikasi penjabaran langsung pembangunan terhadap lingkungan hidup secara spesifik pada tingkat kecamatan berdasarkan dokumen KLHS tersebut.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, Kecamatan Semarang Timur tetap mempedomani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan tema-tema strategis yang muncul dalam dokumen KLHS Kota Semarang sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan renstra yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (4) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur adalah isu pilar ketiga yaitu “Lingkungan”yang meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau, mitigasi bencana banjir dan longsor, penyediaan air bersih, serta edukasi lingkungan hidup masyarakat.

Tabel 2.9

Tema Isu KLHS terhadap Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
"Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kota Semarang yang Hebat, Bersih, dan Berkelanjutan".	1. Program yang dicanangkan termasuk peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan.
	2. Penekanan pada upaya penghijauan wilayah untuk meningkatkan kualitas udara dan ruang terbuka hijau.
	3. Pemanfaatan potensi ekologi desa wisata seperti pelestarian hutan, sungai, danau, serta pantai.
	4. Pengembangan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana di Kota Semarang
	5. Secara keseluruhan, tema ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi Kota Semarang sebagai kota yang hebat, bersih, dan berkelanjutan.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Semarang Timur

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur adalah isu strategis ke tujuh, yaitu “Penyelenggaraan Good Governance”. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Semarang Timur, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Timur, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

Tabel 2.10
Isu Strategis Kecamatan Semarang Timur
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Timur	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Semarang Timur
		belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Timur						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur
		belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur						peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Semarang Timur

Sumber : Kecamatan Semarang Timur 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Semarang Timur dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal "Reformasi Birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi"; "Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan"; "Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan".

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah "**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**", dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Semarang Timur

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, yaitu :

1. **"Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Timur"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).
2. **"Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Semarang Timur"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Semarang Timur

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dimana Kecamatan Semarang Timur mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Semarang Timur.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Semarang Timur maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur

Dengan indikator sasaran yaitu :

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Timur**.
   Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Timur**
   Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Timur**".

   Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur**".

   Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Timur melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Semarang Timur.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat									
	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur		**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Timur**	Angka	N/A	N/A	95.00	95.25	95.50	95.75	96.00	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Timur**	Angka	76.30	76,35	76.40	76,45	76.50	76,55	76.60	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Timur	Angka	95,03%	95,00%	95,50%	95,70%	96,00%	96,30%	96,50%	
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur	**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Timur**	Persen	N/A	N/A	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat	Angka	N/A	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Kecamatan Semarang Timur									
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang												
		SASARAN 3 : **Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan**	**Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur**	Angka	N/A	N/A	80 Angka	82 Angka	84 Angka	86 Angka	88 Angka	

Sumber: Kecamatan Semarang Timur 2025

3.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Semarang Timur mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Semarang Timur dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur	Memaksimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur	Menguatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur	Menyempurnakan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur	Penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur	Percepatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur	Percepatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur

Sumber: Kecamatan Semarang Timur 2025

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Semarang Timur agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Semarang Timur merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Timur	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Timur	
			Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Timur	
			Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Timur	
			Peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur	
			Peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Timur	
			Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Timur	
			Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Timur	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur	
			Peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Timur	
			Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur	
			Peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Timur	

Sumber: Kecamatan Semarang Timur 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur	1. Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Timur
			2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Timur
			3. Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Timur
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur	1. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Timur
			2. Peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur
			4. Peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Timur
			5. Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Timur
			6. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Timur
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur	1. Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Timur
			2. Peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Timur
			3. Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur
			4. Peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Timur

Sumber: Kecamatan Semarang Timur *2025*

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Semarang Timur untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Semarang Timur

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur**				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Timur**		**Camat**
					Nilai Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen		
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Timur (Angka)		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Angka)		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur		Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sekretaris Camat
					Persentasae Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	7.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.1.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan,

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan		Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Timur	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	7.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis	Staf Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur	7..01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7..01.01.1.06 .0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7..01.01.1.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7..01.01.1.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7..01.01.1.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7..01.01.1.06 .0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.1.07 .0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat	7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur	kepada Kecamatan Semarang Timur yang selesai ditindaklanjuti		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.1.08 .0002 penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.1.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur sesuai ketentuan	7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.1.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur			Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan yang tepat waktu		Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat di Kecamatan Semarang Timur		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan sosial Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Pemerintahan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Timur	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bugangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bugangan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bugangan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasi e Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Bugangan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangtempel	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangtempel	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Karangtempel
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasi e Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Karangtempel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangturi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangturi	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Karangturi
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Sekretaris/Kasi e Pelayanan Publik/Staf

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangturi
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kebonagung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kebonagung	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kebonagung
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Kebonagung
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kemijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kemijen	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kemijen
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Kemijen
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mlatibaru	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mlatibaru	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Mlatibaru
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Mlatibaru
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Lurah Mlatiharjo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				menyeluruh di Kelurahan Mlatiharjo	Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mlatiharjo	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasi e Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Mlatiharjo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Rejomulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Rejomulyo	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Rejomulyo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasi e Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Rejomulyo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Rejosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Rejosari	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Rejosari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasi e Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Rejosari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sarirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sarirejo	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Sarirejo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	7.01.02.2.02.0003	Sekretaris/Kasi e Pelayanan Publik/Staf

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sarirejo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Semarang Timur	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Seksi Pembangunan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di kelurahan Bugangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Bugangan	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kelurahan Bugangan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bugangan	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/ Staf Kelurahan Bugangan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kelurahan Karangtempel
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangturi	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/ Staf Kelurahan Karangtmpel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kelurahan Karangturi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangturi	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/ Staf Kelurahan Karangturi
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah kelurahan Kebonagung
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kebonagung	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/ Staf Kelurahan Kebonagung
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah kelurahan Kemijen
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kemijen	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/ Staf Kelurahan Kemijen
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah kelurahan Mlatibaru
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mlatibaru	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan /Staf Kelurahan Mlatibaru

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah kelurahan Mlatiharjo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mlatiharjo	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan /Staf Kelurahan Mlatiharjo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah kelurahan Rejomulyo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Rejomulyo	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan /Staf kelurahan Rejomulyo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah kelurahan Rejosari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Rejosari	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan /Staf kelurahan Rejosari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah kelurahan Sarirejo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kasi Pembangunan /Staf

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dilimpahkan di Kelurahan Sarirejo		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kelurahan Sarirejo
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Timur		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	7.01.04 .2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04 .2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada Tingkat kecamatan di Kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Timur	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Semarang Timur				
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang		**Meningkatnya kualitas kinerja Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Semarang Timmur**			**Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan**		**Camat**
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di Kecamatan Semarang Timur		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kasi Pembangunan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 .0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Kepala Seksi Pembangunan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kecamatan dan lurah
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bugangan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kelurahan dan staf kelurahan Bugangan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Karangtempel
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							sosial kelurahan dan staf kelurahan Karangtempel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Karangturi
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kelurahan dan staf kelurahan Karangturi
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kebonagung
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kelurahan dan staf kelurahan Kebonagung
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kemijen
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kelurahan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan staf kelurahan Kemijen
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Mlatibaru
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kelurahan dan staf kelurahan Mlatibaru
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Mlatiharjo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kelurahan dan staf kelurahan Mlatiharjo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Rejomulyo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kelurahan dan staf

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							kelurahan Rejomulyo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Rejosari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kelurahan dan staf kelurahan Rejosari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Sarirejo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kelurahan dan staf kelurahan Sarirejo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi Pemerintahan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bugangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan dan staf kelurahan Bugangan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Karangtempel
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan dan staf kelurahan Karangtempel
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Karangturi
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan staf kelurahan Karangturi
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kebonagung
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan dan staf kelurahan Kebonagung
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kemijen
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan dan staf kelurahan Kemijen
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Mlatibaru

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan dan staf kelurahan Mlatibaru
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Mlatiharjo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan dan staf kelurahan Mlatiharjo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Rejomulyo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan dan staf

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							kelurahan Rejomulyo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Rejosari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan dan staf kelurahan Rejosari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Sarirejo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kec dan Kel)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban kelurahan dan staf kelurahan Sarirejo
				Meningkatnya fumgsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							sosial kecamatan
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi perekonomian dan kesejahteraan sosial kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Sumber : Kecamatan Semarang Timur 2025

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan**	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur**		
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	**Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	**Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling)**	**Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib**		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	**Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
5.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat Organisasi Pemerintahan terkecil**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.	**Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
8.	**Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2025 – 2029

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Semarang Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Kewilayahan													
7.01 Kecamatan													
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**17.294.541.718**		**19.882.360.111**		**21.136.150.534**		**21.372.061.699**		**22.032.755.391**	Kecamatan Semarang Timur
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang berkualitas**	**100,00 %**	**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang timur	**100,00 %**	**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		
7.01.01.2.01 - **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**36.647.800**		**39.529.734**		**43.972.565**		**44.330.795**		**79.840.267**	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00 %**	**100,00 %**	**36.647.800**	**100,00 %**	**39.529.734**	**100,00 %**	**43.972.565**	**100,00 %**	**44.330.795**	**100,00 %**	**79.840.267**	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.397.200		5.156.412		5.371.607		5.208.767		62.500.000	Kecamatan Semarang Timur

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.939.800		2.096.969		2.196.969		2.531.282		1.531.282	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.939.800		2.268.629		2.495.492		2.745.041		1.745.041	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.717.800		2.928.749		2.321.624		2.753.786		1.753.786	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.917.800		2.275.349		4.602.884		3.909.532		1.909.532	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.735.400		2.803.626		2.983.989		2.182.387		2.400.626	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				20.000.000		22.000.000		24.000.000		25.000.000		8.000.000	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
7.01.01.2.02 - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14.925.361.823**		**15.703.116.533**		**16.469.756.290**		**17.262.347.764**		**18.050.234.924**	Kecamatan Semarang Timur
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.372.345.623		15.090.955.704		15.845.496.217		16.637.763.684		17.469.644.450	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	71 Orang	85 Orang		85 Orang		85 Orang		85 Orang		85 Orang		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				552.120.000		610.124.399		622.120.000		622.120.000		578.579.986	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				561.000		678.810		746.691		821.360		503.496	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				223.800		950.818		945.900		1.150.490		965.539	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1 Laporan	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				111.400		406.802		447.482		492.230		541.453	Staf Kecamatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur												
7.01.01.2.05 - **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**28.400.000**		**48.900.000**		**61.400.000**		**65.400.000**		**57.400.000**	Kecamatan Semarang Timur
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	**Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur**	**0**	**84 Angka**		**86 Angka**		**88 Angka**		**90 Angka**		**92 Angka**		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		12.500.000		25.000.000		28.000.000		20.000.000	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18.400.000		36.400.000		36.400.000		37.400.000		37.400.000	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	185 Orang		185 Orang		185 Orang		185 Orang		185 Orang		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.06 - **Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**338.912.792**		**1.305.336.352**		**1.806.161.068**		**1.231.561.287**		**1.025.943.103**	Kecamatan Semarang Timur
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**	**1.150.943.103**	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.364.240		100.000.000		150.000.000		115.000.000		50.000.000	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 paket	12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.905.065		41.775.065		46.775.065		50.000.000		10.000.000	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 paket	7 paket		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.300.000		175.730.000		285.730.000		175.730.000		125.730.000	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	50 laporan		50 laporan		50 laporan		50 laporan		50 laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				151.277.000		382.764.800		647.764.800		308.764.800		258.146.616	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan				100.066.487		605.066.487		675.891.203		582.066.487		582.066.487	Kecamatan Semarang Timur

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Berbasis Elektronik pada SKPD													
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		
7.01.01.2.07 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**207.808.756**		**531.830.663**		**485.404.663**		**471.830.663**		**471.830.663**	Kecamatan Semarang Timur
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				207.808.756		531.830.663		485.404.663		471.830.663		471.830.663	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		
7.01.01.2.08 – **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.252.261.880**		**1.396.850.829**		**1.326.309.948**		**1.358.714.508**		**1.374.359.771**	Kecamatan Semarang Timur
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur yang selesai ditindaklanjuti**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		294.588.949		224.048.068		256.452.628		272.097.891	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.052.261.880		1.102.261.880		1.102.261.880		1.102.261.880		1.102.261.880	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	13 laporan		13 laporan		13 laporan		13 laporan		13 laporan		
7.01.01.2.09 - **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**505.148.667**		**856.796.000**		**943.146.000**		**937.876.682**		**973.146.663**	Kecamatan Semarang Timur
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur sesuai ketentuan**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.223.000		253.716.000		253.716.000		203.716.663		203.716.663	Kecamatan Semarang Timur
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	23 Unit		23 Unit		23 Unit		23 Unit		23 Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				104.925.667		203.080.000		269.430.000		284.160.019		269.430.000	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		400.000.000		420.000.000		450.000.000		500.000.000	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**1.582.516.449**		**1.979.732.756**		**2.036.908.463**		**2.073.593.524**		**2.153.332.019**	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat di Kecamatan Semarang Timur	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**	**2.028.332.019**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**132.500.000**		**227.102.296**		**239.786.318**		**231.471.379**		**206.209.874**	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal di Kecamatan Semarang Timur	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di Kecamatan Semarang Timur**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**	**206.209.874**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100,00%**	**100,00%**	**125.000.000**	**100,00%**	**219.602.296**	**100,00%**	**232.286.318**	**100,00%**	**223.971.379**	**100,00%**	**198.709.874**	Kecamatan Semarang Timur
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				125.000.000		219.602.296		232.286.318		223.971.379		198.709.874	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				**1.084.000.000**		**1.316.614.011**		**1.326.105.696**		**1.336.105.696**		**1.416.105.696**	Kecamatan Semarang Timur
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Timur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				200.000.000		282.614.011		242.105.696		242.105.696		242.105.696	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				101.000.000		116.000.000		121.000.000		122.000.000		175.000.000	Kelurahan Rejosari
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			95.000.000		110.000.000		115.000.000		116.000.000		119.000.000	Kelurahan Kemijen
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			85.000.000		100.000.000		105.000.000		106.000.000		109.000.000	Kelurahan Mlatiharjo
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			87.000.000		102.000.000		107.000.000		108.000.000		111.000.000	Kelurahan Karang tempel
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			84.000.000		99.000.000	12 laporan	104.000.000	12 laporan	105.000.000	12 laporan	108.000.000	Kelurahan Kebonagung
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			85.000.000		100.000.000		105.000.000		106.000.000		109.000.000	Kelurahan Rejomulyo
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			85.000.000		100.000.000		105.000.000		106.000.000		109.000.000	Kelurahan Bugangan
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			86.000.000		101.000.000		106.000.000		107.000.000		110.000.000	Kelurahan Karangturi
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			89.000.000		104.000.000		109.000.000		110.000.000		113.000.000	Kelurahan Mlatibaru
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			87.000.000		102.000.000		107.000.000		108.000.000		111.000.000	Kelurahan Sarirejo
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**366.016.449**		**436.016.449**		**471.016.449**		**506.016.449**		**531.016.449**	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Semarang Timur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamaatan Semarang Timur**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				216.016.449		256.016.449		261.016.449		266.016.449		271.016.449	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Karangtempel
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Karangturi
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Rejosari
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Sarirejo
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Bugangan
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Kebonagung
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Mlatibaru
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Mlatiharjo

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Kemijen
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.000.000		18.000.000		21.000.000		24.000.000		26.000.000	Kelurahan Rejomulyo
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**183.113.993**		**202.486.652**		**210.918.535**		**212.467.352**		**216.120.691**	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**183.113.993**		**202.486.652**		**210.918.535**		**212.467.352**		**216.120.691**	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**		**12 Kegiatan**		**12 Kegiatan**		**12 Kegiatan**		**12 Kegiatan**		
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				183.113.993		202.486.652		210.918.535		212.467.352		216.120.691	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**99.923.366**		**110.494.821**		**115.096.011**		**115.941.184**		**117.934.772**	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada Tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Timur**	**80,00%**	**82,00%**		**82,00%**		**82,00%**		**82,00%**		**82,00%**		
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**99.923.366**		**110.494.821**		**115.096.011**		**115.941.184**		**117.934.772**	Kecamatan Semarang Timur
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**		**2 Kegiatan**		**2 Kegiatan**		**2 Kegiatan**		**2 Kegiatan**		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				99.923.366		110.494.821		115.096.011		115.941.184		117.934.772	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**29.402.106.927**		**29.913.909.000**		**30.124.929.000**		**30.131.900.000**		**30.050.909.000**	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		100,00%		
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**1.451.896.927**		**1.446.749.000**		**1.644.769.000**		**1.638.740.000**		**1.538.749.000**	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	**Jumlah laporan hasil musrenbang**	**15 Laporan**	**15 Laporan**		**15 Laporan**		**15 Laporan**		**15 Laporan**		**15 Laporan**		
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam		6 lembaga kemasyara katan		6 lembaga kemasyara katan		6 lembaga kemasyara katan		6 lembaga kemasyara katan		6 lembaga kemasyara katan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 lembaga kemasyarakatan											
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di kelurahan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100 Kegiatan**	**100 Kegiatan**	**1.391.896.927**	**100 Kegiatan**	**1.386.749.000**	**100 Kegiatan**	**1.638.769.000**	**100 Kegiatan**	**1.578.740.000**	**100 Kegiatan**	**1.478.749.000**	Kecamatan Semarang Timur
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				568.496.927		563.349.000		661.369.000		655.340.000		655.349.000	Kecamatan Semarang Timur
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			113.000.000		113.000.000		123.000.000		123.000.000		113.000.000	Kelurahan Rejosari
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			96.200.000		96.200.000		106.200.000		106.200.000		96.200.000	Kelurahan Kemijen
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			75.200.000		75.200.000		85.200.000		85.200.000		75.200.000	Kelurahan Mlatiharjo
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			71.000.000		71.000.000		81.000.000		81.000.000		71.000.000	Kelurahan Karangtempel
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			66.800.000		66.800.000		76.800.000		76.800.000		66.800.000	Kelurahan Kebonagung
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			79.400.000		79.400.000		89.400.000		89.400.000		79.400.000	Kelurahan Rejomulyo
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			79.400.000		79.400.000		89.400.000		89.400.000		79.400.000	Kelurahan Bugangan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			71.000.000		71.000.000		81.000.000		81.000.000		71.000.000	Kelurahan Karangturi
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			87.800.000		87.800.000		97.800.000		97.800.000		87.800.000	Kelurahan Mlatibaru
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			83.600.000		83.600.000		93.600.000		93.600.000		83.600.000	Kelurahan Sarirejo
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas ormas	4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		4 pokmas ormas		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**27.950.210.000**		**28.467.160.000**		**28.480.160.000**		**28.493.160.000**		**28.512.160.000**	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya**	**18 Dokumen**	**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000	Kecamatan Semarang Timur
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			6.186.640.000		6.236.640.000		6.236.640.000		6.236.640.000		6.236.640.000	Kelurahan Rejosari
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			3.992.560.000		4.042.560.000		4.042.560.000		4.042.560.000		4.042.560.000	Kelurahan Kemijen
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			2.039.080.000		2.089.080.000		2.089.080.000		2.089.080.000		2.089.080.000	Kelurahan Mlatiharjo

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			1.972.800.000		2.022.800.000		2.022.800.000		2.022.800.000		2.022.800.000	Kelurahan Karangtempel
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			1.380.440.000		1.430.440.000		1.430.440.000		1.430.440.000		1.430.440.000	Kelurahan Kebonagung
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			2.061.520.000		2.111.520.000		2.111.520.000		2.111.520.000		2.111.520.000	Kelurahan Rejomulyo
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			3.113.680.000		3.163.680.000		3.163.680.000		3.163.680.000		3.163.680.000	Kelurahan Bugangan
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			1.315.200.000		1.365.200.000		1.365.200.000		1.365.200.000		1.365.200.000	Kelurahan Karangturi

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			3.114.720.000		3.164.720.000		3.164.720.000		3.164.720.000		3.164.720.000	Kelurahan Mlatibaru
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			2.478.520.000		2.528.520.000		2.528.520.000		2.528.520.000		2.528.520.000	Kelurahan Sarirejo
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		6 lembaga kemasyarakatan		
Meningkatnya fumgsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	**Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan**	**100,00%**	**100,00%**	**13.050.000**	**100,00%**	**20.000.000**	**100,00%**	**23.000.000**	**100,00%**	**26.000.000**	**100,00%**	**30.000.000**	Kecamatan Semarang Timur
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				13.050.000		20.000.000		23.000.000		26.000.000		30.000.000	Kecamatan Semarang Timur
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 lembaga kemasyarakatan		1 lembaga kemasyarakatan		1 lembaga kemasyarakatan		1 lembaga kemasyarakatan		1 lembaga kemasyarakatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	**Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	**100,00%**	**100,00%**	**155.000.000**	**100,00%**	**165.000.000**	**100,00%**	**175.000.000**	**100,00%**	**185.000.000**	**100,00%**	**200.000.000**	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				155.000.000		165.000.000		175.000.000		185.000.000		200.000.000	Kecamatan Semarang Timur

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		

Sumber: Kecamatan Semarang Timur 2025

Dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2025-2029, Kecamatan turut berperan aktif dalam peningkatan PAD melalui retribusi penyewaan aset di kecamatan dan kelurahan. Berikut akan dijelaskan secara rinci untuk target pendapatan kecamatan Semarang Timur.

Tabel 0.1
Rencana Pendapatan di Kecamatan Semarang Timur
Tahun 2026 – 2030

Uraian Pendapatan Retribusi	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Retribusi Daerah	4.020.000	4.301.400	4.602.498	4.924.673	5.269.400	5.638.258	6.032.936	
Retribusi Jasa Usaha	4.020.000	4.301.400	4.602.498	4.924.673	5.269.400	5.638.258	6.032.936	
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.020.000	4.301.400	4.602.498	4.924.673	5.269.400	5.638.258	6.032.936	

Sumber: Kecamatan Semarang Timur 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Semarang Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semarang Timur yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan : Meningkatkan Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur									
	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Timur	Angka	N/A	95.00	95.25	95.50	95.75	96.00	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan									
	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	N/A	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan	Angka	N/A	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan									
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	N/A	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	

Sumber : Kecamatan Semarang Timur 2025

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sesuai RPJMD dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

Sumber : RPJMD Kota Semarang 2025-2029

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Semarang Timur Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Semarang Timur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan penunjang kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Semarang Timur. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Semarang Timur ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Semarang Timur.

Permasalahan belum optimalnya kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Semarang Timur. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Semarang Timur.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Semarang Timur. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Semarang Timur sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Semarang Timur Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

40. KECAMATAN SEMARANG TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan maka Kecamatan Semarang Tengah wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang kewilayahan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 47).
29. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
31. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Semarang Tengah adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Kewilayahan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Tengah adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Semarang Tengah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Semarang Tengah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, tugas pokok dari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Semarang Tengah mempunyai fungsi:

Selanjutnya Kecamatan Semarang Tengah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
m. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
n. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

A. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Tengah telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Sekretariat terdiri atas:

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

d. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

f. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

g. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.

h. Jabatan Fungsional

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kelurahan

a. Lurah
   Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
b. Sekretariat Kelurahan
   Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
c. Seksi Pembangunan Kelurahan
   Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.
d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
   Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.
e. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum
   Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Camat Semarang Tengah Kota Semarang.

Susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

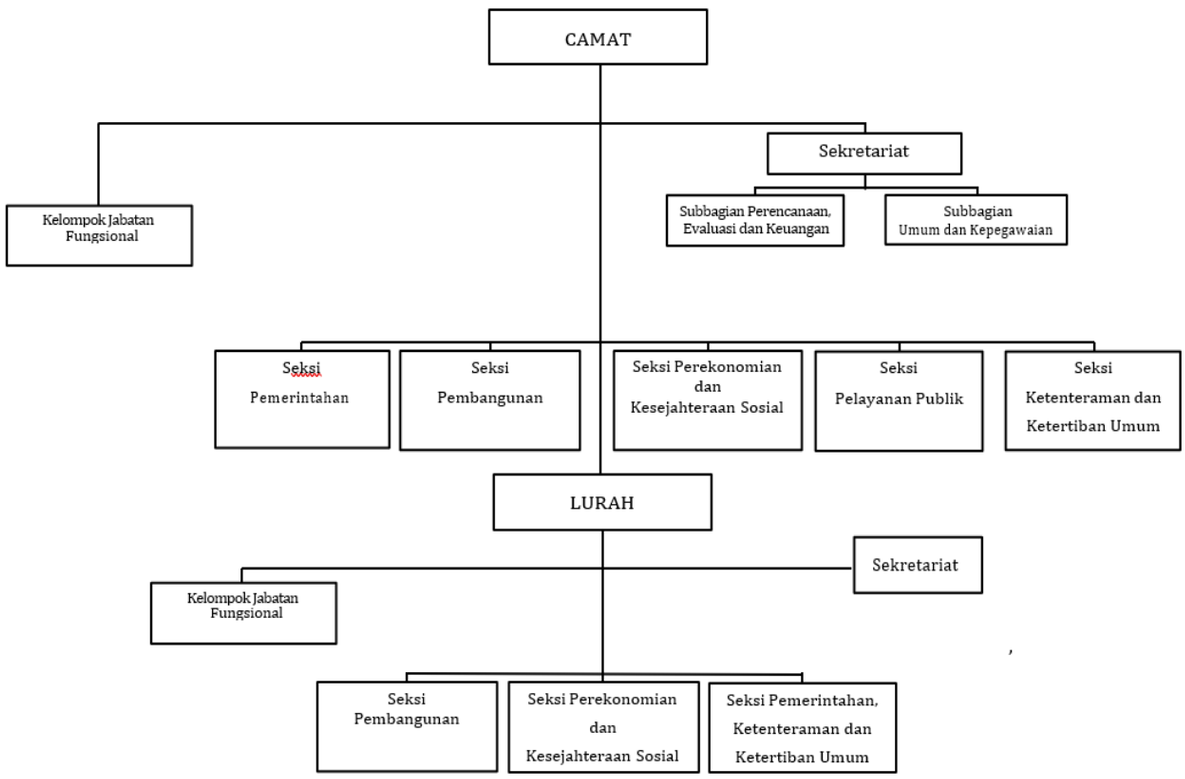

B. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Semarang Tengah

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Semarang Tengah adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

1) perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5) penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi

Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;

6) penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11) penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
15) penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16) penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
17) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
18) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
19) penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Mijen menyelenggarakan fungsi :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   d) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   e) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
h) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum, antara lain:
a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

8) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   b) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   c) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   d) evaluasi Kelurahan.
9) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
   a) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
   b) Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   c) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   d) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   e) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
   f) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
   g) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
   h) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
   i) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
   j) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
   k) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
   l) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.
10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
   a) pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
   b) penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
   c) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
   d) pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan.
11) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
   a) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
   b) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
   c) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
   d) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
   e) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

13) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
   a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
   b) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
   c) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
14) Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
7) pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
8) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
9) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;

10) pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
11) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
12) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
13) pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
14) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
15) pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
16) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
17) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
18) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
19) pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
20) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
21) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
22) pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;
23) pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
24) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
25) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
26) pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
27) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
28) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
29) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
30) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;

4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
6) menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
7) menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
10) menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
11) menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
13) menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
17) menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
20) menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
22) menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
24) menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

25) menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
26) menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
27) menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
28) menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
29) menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
30) menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
32) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
34) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
35) menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;
36) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
37) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan; mm.menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
39) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
40) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
41) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
6) menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
9) menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;

10) menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
11) menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16) menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
17) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
18) menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);
20) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
21) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
22) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
24) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
25) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
28) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
29) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
30) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
32) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
33) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
8) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
11) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
13) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
14) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia; r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
20) menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
21) menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
22) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
23) menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
24) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;

25) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
26) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
27) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
28) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
29) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
30) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
31) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
32) menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
34) menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
35) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
36) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
37) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
39) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
40) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
41) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
42) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
6) menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
7) menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
8) menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
11) menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
12) menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
14) menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
15) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
16) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
17) menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
18) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
19) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
20) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
21) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
22) menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
24) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
26) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
27) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
11) menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
20) menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum; u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
21) menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
25) menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
28) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
29) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
30) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
32) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
34) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
35) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
37) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
38) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
39) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
40) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2) pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
9) pelaksanaan kegiatan koordinasi;
10) pelaksanaan kegiatan sekretariat;
11) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;

12) pelaksanaan kegiatan pembangunan;
13) pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
14) pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
15) pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
16) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
17) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
18) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
19) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
20) pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
21) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
   3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   4) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   5) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
   2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
   3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
   4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
   1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
   3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   2) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   3) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   4) evaluasi Kelurahan;
i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
   1) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   2) peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   3) peningkatan ketahanan pangan keluarga;

4) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
5) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
6) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
7) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
8) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
9) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
10) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
2) penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
3) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
4) Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
2) peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3) penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
4) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
5) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;

n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan

o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Kecamatan Semarang Tengah di klasifikasikan ke dalam 2 kategori, berdasarkan tingkat Pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2025 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah PNS	Persentase	Non PNS		Jumlah Non PNS	Persentase
		L	P			L	P		
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-
1	SMP Sederajat	2	-	2	1,80	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	3	6	5,41	20	3	23	69,70
3	D3	10	10	20	18,02	-	1	1	3,03
4	S1	49	20	69	62,16	2	7	9	27,27
5	S2	10	4	14	12,61	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		74	37	111	100	22	11	33	100

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

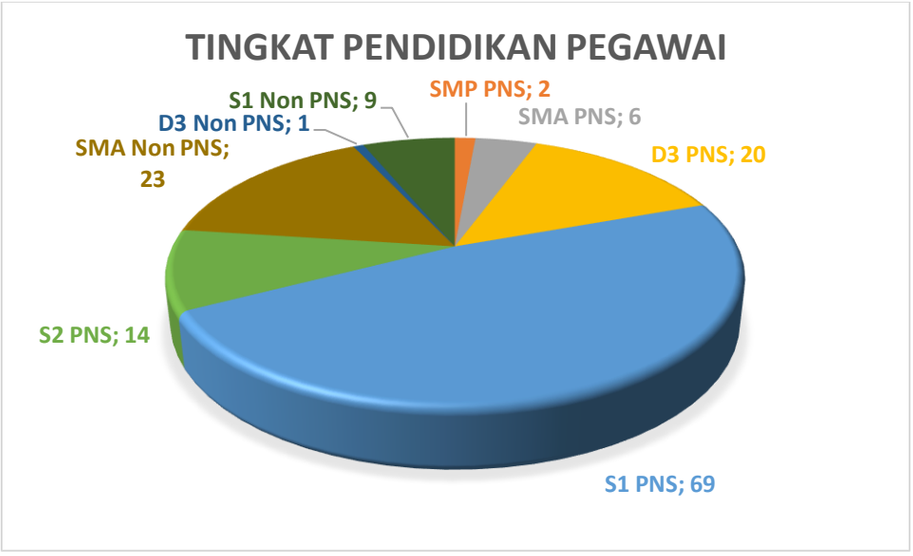

Gambar 2.2
Komposisi PNS dan Non PNS Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari jumlah pegawai sebanyak 144 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah	Persentase terhadap jumlah pegawai
1	**Golongan II**	**10**	**8**	**18**	**16,22%**
	II/a	-	-	-	-
	II/b	1	-	-	0,90%
	II/c	1	1	2	1,80%
	II/d	8	7	15	13,51%
2	**Golongan III**	**48**	**23**	**71**	**63,96%**
	III/a	4	2	6	5,41%
	III/b	10	-	10	9,01%
	III/c	20	6	26	23,42%
	III/d	14	15	29	26,13%
3	**Golongan IV**	**1**	**2**	**3**	**2,70%**
	IVa	-	2	2	1,80%
	IVb	1	-	1	0,90%
4	**Golongan IX**	**14**	**3**	**17**	**15,32%**
	IX	14	3	17	15,32%
5	**Golongan VIII**	**-**	**2**	**2**	**1,80%**
	VIII	-	2	2	1,80%
JUMLAH		73	38	111	100%

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

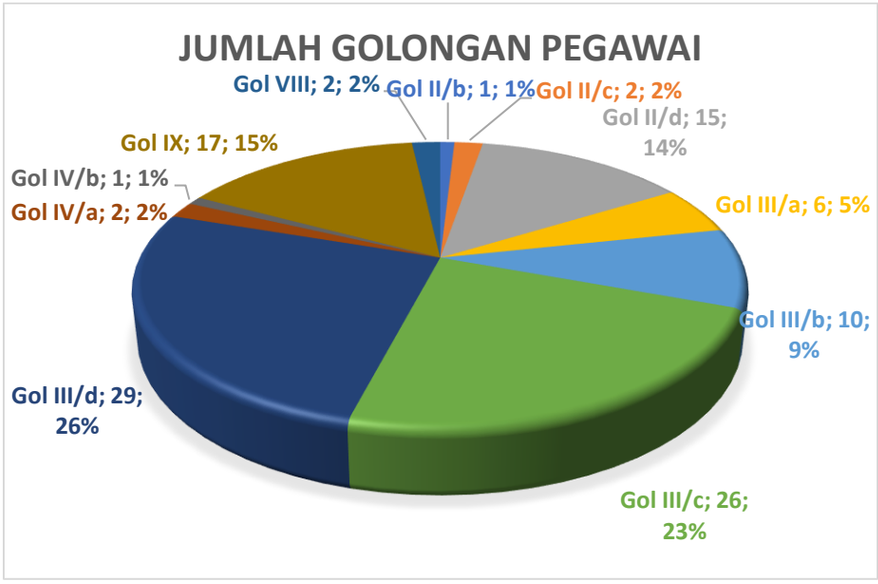

Gambar 2.3
Komposisi ASN Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025
Berdasarkan Golongan / Ruang

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Semarang Tengah berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Kecamatan Semarang Tengah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Kampung	1.170,00	1974	JL tmn pekunden timur No 38	Hak Pakai	23/04/2007	HP 31	kantor dan balai kel pekunden	PEMBELIAN	2.355.210,00	kondisi baik - tana negara - 50.03.10.
2	Tanah Kampung	490,00	1974	JL tmn pekunden timur NO:38	Hak Pakai	30/04/2007	HP 33	lapangan parkir	PEMBELIAN	799.161,00	kondisi baik - tana negara - 50.03.10.
3	Tanah Kampung	343,00	1975	JL H Agus salim	Hak Pakai	30/04/2007	HP 18	kantor kelurahan purwodinatan balai	PEMBELIAN	61.061,16	kondisi baik - pem 50.03.04.00
4	Tanah Kampung	236,00	1975	JL H Agus salim	Hak Pakai			kelurahan	PEMBELIAN	261.676,56	kondisi baik - pem 50.03.04.00
5	Tanah Kampung	89,00	1976	JL taman seteran barat No 3	Hak Pakai	30/04/2007	HP 6	taman PKK kel miroto	PEMBELIAN	30.030,00	kondisi baik - tana Pemkot - 50.03.03
6	Tanah Kampung	187,00	1976	JL batan miroto	Hak Pakai	30/04/2007	Proses Sertifikat HP 6	MCK kel miroto kantor kel gabahan	PEMBELIAN	153.901,00	kondisi baik - tana Pemkot - 50.03.03
7	Tanah Kampung	104,00	1976	JL gabahan No.212	Hak Pakai				PEMBELIAN	58.480,00	kondisi baik. - APB 50.03.14.00
8	Tanah Lapangan Lainnya	5.284,00	1979	Jlan Pemuda Kel sekayu Kec Smg Tengah	Hak Pakai	09/02/2012	32	Taman Tugu Muda	Pembelian	38.684.164,00	
9	Tanah Lapangan Lainnya	1.020,00	1979	Jl Pemuda Kel Sekayu Kec Smg Tengah	Hak Pakai	24/08/2011	30	Taman Pemuda	Pembelian	7.467.420,00	
10	Tanah Lapangan Taman lainnya	635,00	1979	Jl.Seroja Barat No. 5 jl. Pekunden Timur no. 38	Hak Pakai	30/04/2007	35	Pertamina Taman	Pembelian	154.305,00	
11	Tanah Lapangan Taman lainnya	159,00	1979		Hak Pakai	30/11/2010	25	Taman dpn Kelurahan	Pembelian	39.750,00	
12	Tanah Kampung	62,00	1980	JL baterman besar 294	Hak Pakai	30/04/2007	HP 11	kantor BKM kel Kembangsari	PEMBELIAN	28.560,00	kondisi baik - tana negara - 50.03.05.
13	Tanah Kampung	62,00	1980	JL baterman besar 294	Hak Pakai	30/04/2007	HP 11	kantor BKM kel Kembangsari	PEMBELIAN	28.560,00	kondisi baik - tana negara - 50.03.05.

14	Tanah Kampung	182,00	1986	JL indraprasta No 5	Hak Pakai	30/04/2007	HP 11	kantor kel pindrikan lor	PEMBELIAN	196.350,00	kondisi baik - APB 50.03.16.00
15	Tanah Kampung	29,00	1988	JL batan selatan	Hak Pakai		Proses Sertifikat	MCK kel miroto	PEMBELIAN	8.990,00	kondisi baik - tana Pemkot - 50.03.03
16	Tanah Kampung	13,00	1993	JL seteran miroto	Hak Pakai	30/04/2007 22/05/2006	Proses Sertifikat	MCK kel miroto MCK kel miroto	PEMBELIAN PEMBELIAN	2.925,00 11.900,00	kondisi baik - tana pemkot - 50.03.03
17	Tanah Kampung	20,00	1993	JL seteran selatan	Hak Pakai		Proses Sertifikat				kondisi baik - tana Pemkot - 50.03.03
18	Tanah Kampung	122,00	1993	JL petempen selatan 2/301	Hak Pakai		HP 9	rumah dinas lurah kembangsari kantor dan	PEMBELIAN	63.070,00	kondisi baik - tana Pemkot - 50.03.05
19	Tanah Kampung	307,00	1993	JL pandansari III/1	Hak Pakai		HP 11 Proses	balai kel pandansari MCK kel miroto	PEMBELIAN PEMBELIAN	196.999,99 7.130,00	kondisi baik - APB 50.03.07.00
20	Tanah Kampung	23,00	1993	JL batan selatan	Hak Pakai		Sertifikat				kondisi baik - tana Pemkot - 50.03.03
21	Tanah Kampung	95,00	1995	JL kp sonet No 344	Hak Pakai	30/04/2007	HP 6	rumah dinas lurah bangunharjo	PEMBELIAN	87.020,00	- APBD - 50.03.06
21	Tanah Kampung	85,00	1998	JL abimanyu 6 kel pindrikan lor	Hak Pakai	30/04/2007	HP 9	eks kantor kel celengan	PEMBELIAN	18.450,00	kondisi baik - APB 50.03.16.00
22	Tanah Kampung	302,00	1998	JL abimanyu raya	Hak Pakai	30/04/2007	HP 10	lapangan volly	PEMBELIAN	109.564,00	kondisi baik - APB 50.03.16.00
23	Tanah Kampung	2.875,00	2000	JL taman ade irma suryani No 26	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Rumah dinas lurah sekayu	PEMBELIAN	316.710,00	- APBD - 50.03.02
24	Tanah Kampung	119,00	2001	JL nakulo 1/No.5	Hak Pakai	22/03/2001	HP 26	kantor dan balai kantor Pend. kidul	PEMBELIAN	122.808,00	kondisi baik - - 50.03.12.00
25	Tanah Kampung	285,00	2009	JL kimangunsarkoro 116	Hak Pakai	23/04/2007	HP 13	kantor kel jagalan	PEMBELIAN	287.000,00	rekomendasi BPK u/ dinilai - Lain-Lai 50.03.15.00
26	Tanah Kampung	57,00	2009	JL kentangan barat	Hak Pakai	30/04/2007	HP 16	exs balai kel kentangan (kel jagalan)	PEMBELIAN	55.000,00	Rekomendasi BPK dinilai ulang - Lain 50.03.15.00
27	Tanah Kampung	59,00	2009	JL inspeksi kali semarang	Hak Pakai	03/09/2010	HP 20	MCK kel jagalan	PEMBELIAN	47.000,00	Rekomendasi BPK dinilai ulang - Lain 50.03.15.00
28	Tanah Kampung	238,00	2009	JL kimangunsarkoro 116	Hak Pakai	30/04/2007	HP 14	balai kel jagalan	PEMBELIAN	254.000,00	Rekomendasi BPK dinilai ulang - Lain

											50.03.15.00
29	Tanah Kampung	55,00	2009	JL kapuran No 548	Hak Pakai	30/04/2007	HP 15	rumah dinas lurah jagalan	PEMBELIAN	31.000,00	Rekomendasi BPK dinilai ulang - Lain 50.03.15.00
30	Tanah Kampung	191,00	2009	JL karangsaru No 9	Hak Pakai	03/09/2010	HP 17	exs kel jagalan	PEMBELIAN	194.000,00	Rekomendasi BPK dinilai ulang - Lain 50.03.15.00
31	Tanah Kampung	166,00	2009	JL kulitan RT1/RW6	Hak Pakai	03/09/2010	HP 21	lap bulutangkis kel jagalan	PEMBELIAN	145.800,00	Rekomendasi BPK dinilai ulang - Lain 50.03.15.00
32	Tanah Kampung	217,00	2010	JL batan miroto III	Hak Pakai	30/04/2007	HP 8	balai karang taruna kel miroto	PEMBELIAN	238.000,00	penilaian 1 nop 20 Lain-Lain - 50.03.0
33	Tanah Kampung	23,00	2010	JL kampung malang No 309	Hak Pakai	30/04/2007	HP 10	kantor BKM (purwomukti) kel	PEMBELIAN	25.200,00	penilaian 1 nop 20 Lain-Lain - 50.03.0
34	Tanah Kampung	229,00	2010	JL baterman besar 284	Hak Pakai	23/04/2007	HP 8 Proses	purwodinatan balai kel kembangsari kantor kel	PEMBELIAN	820.600,00	hasil penilaian 201 Lain-Lain - 50.03.0
35	Tanah Kampung	414,00	2010	JL prembaen 945	Hak Pakai		Sertifikat Proses	kembangsari taman PKK kel bangunharjo taman	PEMBELIAN	621.000,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0
36	Tanah Kampung	24,00	2010	Kp kepatihan RT 03 RW 1	Hak Pakai		Sertifikat	PKK wahid hasim	PEMBELIAN	2.000,00	penilaian 1 nop 20 Lain-Lain - 50.03.0
37	Tanah Kampung	3,00	2010	JL KH wahid Hasim	Hak Pakai				PEMBELIAN	1.800,00	penilaian 1 nop 20 Lain-Lain - 50.03.0
38	Tanah Kampung	6,00	2010	kp. sonet rt/rw 06/04	Hak Pakai				PEMBELIAN	3.600,00	penilaian 1 nop 20 Lain-Lain - 50.03.0
39	Tanah Kampung	298,00	2010	Jl kp jonegaran No 310	Hak Pakai	17/11/2005	HP 3	kantor dan balai kel bangunharjo	PEMBELIAN	369.500,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0
40	Tanah Kampung	56,00	2010	JL. Kp Sukolilo RT2/RW4	Hak Pakai	03/09/2010	HP 7	pos kampling	PEMBELIAN	21.900,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0
41	Tanah Kampung	310,00	2010	JL. kp.sukolilo RT.2/RW4	Hak Pakai	03/09/2010	HP 8	lapangan, MCK, musholla	PEMBELIAN	196.100,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0
42	Tanah Kampung	36,00	2010	JL Kp cokro RT4/RW4	Hak Pakai	03/09/2010	HP 9	taman PKK	PEMBELIAN	6.200,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0
43	Tanah Kampung	10,00	2010	JL kampung sonet RTV/IV	Hak Pakai	24/08/2011	Proses Sertifikat 16	taman PKK	PEMBELIAN	1.400,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0
44	Tanah Kampung	12,00	2010	kp sumeneban, JL inspeksi kali smg.	Hak Pakai		Proses	MCK kel kauman	PEMBELIAN	21.700,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0
45	Tanah Kampung	32,00	2010	JL kauman pompa	Hak Pakai	17/11/2005	Sertifikat	balai LPMK kel kauman	PEMBELIAN	41.900,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0
46	Tanah Kampung	62,00	2010	JL kp sumeneban 88 a	Hak Pakai	17/11/2005	HP 12	rumah dinas lurah	PEMBELIAN	55.500,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0
47	Tanah Kampung	94,00	2010	JL kauman pompa 218	Hak Pakai		HP 13	kauman kantor kel kauman	PEMBELIAN	125.500,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.0

48	Tanah Kampung	300,00	2010	JL DI panjaitan RW 5	Hak Pakai		Proses Sertifikat	pos dan taman eks kantor dan balai	PEMBELIAN	246.300,00	penilaian 1 nop 20 Lain-Lain - 50.03.1
49	Tanah Kampung	278,00	2010	JL karangwulansari No 11, RT 01/5	Hak Pakai	29/11/2000	HP 42 Proses	karangkidul lap bulutangkis pos	PEMBELIAN	333.800,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
50	Tanah Kampung	150,00	2010	JL brumbungan 5 RT/4-5	Hak Pakai		Sertifikat Proses	keamanan taman toga taman PKK	PEMBELIAN	172.700,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
51	Tanah Kampung	20,00	2010	JL karanganyar RT.4	Hak Pakai		Sertifikat HP 50	taman PKK kel brumbungan taman	PEMBELIAN	21.000,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
52	Tanah Kampung	159,00	2010	JL brumbungan III RT4/2 (utara)	Hak Pakai	30/04/2007	Proses Sertifikat HP	bermain taman bermain dan PKL	PEMBELIAN	108.200,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
53	Tanah Kampung	82,00	2010	JL brumbungan 5 RT3/2	Hak Pakai		49 HP 46	rumah dinas rumah taman toga	PEMBELIAN	46.400,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
54	Tanah Kampung	103,00	2010	JL brumbungan 5 RT4,5/2	Hak Pakai		HP 45 HP 44	exs kel.gandekan ex.balai kel.gandek	PEMBELIAN	56.700,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
55	Tanah Kampung	150,00	2010	JL karangwulansari RW 5	Hak Pakai	30/04/2007	HP 48 HP 18	puspo balai LPMK kel pendrikan	PEMBELIAN	158.500,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
56	Tanah Kampung	1.622,00	2010	JL taman brumbungan raya No.9	Hak Pakai	30/04/2007	HP 19 HP 8	lor pasar kel miroto	PEMBELIAN	1.379.100,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
57	Tanah Kampung	550,00	2010	JL tmn brumbungan No 9	Hak Pakai	23/04/2007	Proses Sertifikat		PEMBELIAN	182.500,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
58	Tanah Kampung	123,00	2010	JL brumbungan III RT4/2(barat)	Hak Pakai	23/04/2007			PEMBELIAN	84.300,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
59	Tanah Kampung	50,00	2010	JL kampung kulitan	Hak Pakai	30/04/2007			PEMBELIAN	32.900,00	penilaian 1 nop 20 Lain-Lain - 50.03.1
60	Tanah Kampung	176,00	2010	JL. kp kulitan	Hak Pakai	03/09/2010			PEMBELIAN	174.100,00	penilaian 1 nop 20 Lain-Lain - 50.03.1
61	Tanah Kampung	136,00	2010	JL abimanyu raya 39	Hak Pakai	03/09/2010			PEMBELIAN	55.800,00	penilaian 2010 - Lain-Lain - 50.03.1
62	Tanah Kampung	366,00	2010	JL tmn seteran barat.	Hak Pakai	30/04/2007			PEMBELIAN	636.000,00	penilaian 1 nop 20 Lain-Lain - 50.03.0
63	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	95,00	2011	Kp. Sonet No. 244 RT.005/RW.004	Hak Pakai	30/04/2007	HP 4	Rumah Dinas	PEMBELIAN	93.000,00	- - 50.03.06.00
64	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.545,00	2011	Jl. Seteran Barat	Hak Pakai	24/06/2005		Kantor Kec, Balai Kel dan Lapangan Olah Raga	PEMBELIAN	8.246.234,30	Ktr Kec & Kel, Rum Kec & Kel, Balai Ke Kel, PKK Kec & Kel Kebun Kec, Lap O
65	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	230,00	2011	Jl. Inspeksi	Hak Pakai	30/04/2007	HP 7	Kantor KUA	PEMBELIAN	381.000,00	- APBD - 50.03.01. - - 50.03.03.00

66	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	204,00	2011	Jl. Seroja Barat No.1	Hak Pakai	23/04/2007	HP 34	Kantor	PEMBELIAN	1.801.728,00	Tempat sendiri - A - 50.03.09.00 - - 50.03.11.00
67	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	55,00	2011	Jl. Wotgandul Stal RT.07/RW.02	Hak Pakai	03/09/2010	HP 76	Balai RT	PEMBELIAN	52.000,00	
68	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	5,00	2011	Jl. KS. Tubun	Hak Pakai	24/08/2011	HP 31	Pos Jaga	PEMBELIAN	15.000,00	- - 50.03.02.00
69	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	28,00	2011	Jl. KH. Wahid Hasyim	Hak Pakai	24/08/2011	Proses Sertifikat	Pos Hansip	PEMBELIAN	122.100,00	Tempat sendiri - A - 50.03.08.00
70	Tanah Lapangan Taman lainnya	128,00	2011	Jl. Anggrek Raya RT.5/RW.5	Hak Pakai	07/08/2007	HP 34	Taman Adipura Kencana	PEMBELIAN	512.000,00	- - 50.03.10.00
71	Tanah Lapangan Taman lainnya	327,00	2011	Jl. Wotgandul Stal RT.007/RW.002	Hak Pakai	03/09/2010	HP 77	Taman, MCK	PEMBELIAN	67.500,00	Tempat sendiri - A - 50.03.11.00

Sumber: RKBMD Semarang Tengah, KIR 2025

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Semarang Tengah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (M2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
			Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak	Tidak	60	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	126.900,00
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	27	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	57.120,00
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	13.5	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	86.475,00
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	4.5	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	8.460,00
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	28	JL tmn pekunden timur		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	155.766,00
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	486	JL tmn pekunden timur		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.181.172,76
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	240	JL seroja barat 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	547.120,48
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	588	JL seroja barat 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	129.600,00
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	169	JL seteran utara no 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	284.543,00
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	100	JL gabahan 212		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	469.036,00
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	140	JL seteran utara 3		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	732.424,00
12	Bangunan Gedung	Baik	Tidak	Tidak	108	JL seteran utara 7-9		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	565.012,80

	Tempat Kerja Lainnya Permanen									
13	Bangunan Gedung	Baik	Tidak	Tidak	7609	JL KH agus salim		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	641.850,00
14	Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	32628	JL KH agus salim		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	264.240,00
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	48	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	130.203,70
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	250	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	396.003,39
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	307	JL pandansari 3/ 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.989.643,12
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik			62	KP sumeneban 88-a		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	217.600,00
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	86	JL nakulo 1/5		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	257.696,72
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	352	JL karangwulansari 11		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	692.904,61
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	171	JL tmn brumbungan 9		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	517.477,00
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	92	Tmn brumbungan 1 Tmn brumbungan 9		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	479.408,07
23	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	31			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	236.543,00
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak	Tidak	375	JL indraprasta 5		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	430.883,70
25	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	28	JL batan selatan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	146.484,80
26	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak	22	JL batan selatan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	115.095,20

27	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	7	JL seteran serut		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	36.621,20
28	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	230	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	243.500,00
29	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	132	Kp jonegaran no 310		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	122.287,43
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	250	Kp jonegaran no 310		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	300.000,00
31	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	94	Kp sonet no 344		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	212.775,00
32	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	7	JL moch suyudi		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	36.621,20
33	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	37	JL batan miroto 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	193.569,20
34	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak	60	JL gang pinggir 70		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	230.400,00
35	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak	12	JL gang pinggir 70		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	225.720,00
36	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	48	JL seteran utara 7-9		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	312.554,80
37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	106	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	78.800,00
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	25	JL kauman pompa		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	37.300,00
39	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	40	JL gang pinggir 93		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	752.400,00
40	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak	Tidak	145	JL kranggan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	66.256,03
41	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak	24	JL inspeksi		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	11.781,82
42	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	208	JL inspeksi		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	102.109,09
43	Bangunan Gedung	Baik	Tidak	Tidak	94	JL kauman pompa 218 JL seteran barat no 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	205.462,00

44	Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	64			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	61.320,00
45	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	178	JL seteran barat no 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	166.724,82
46	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	35	JL gabahan RT3		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	38.400,00
47	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	255	JL abimanyu raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	48.967,52
48	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	75	JL abimanyu 6		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	18.450,00
49	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak	64	JL inspeksi		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	31.418,18
50	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		JL beteng		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	225.720,00
51	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	207	JL tmn ade Irma suryani Kp sonet RT 5		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	258.143,00
52	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	10	JL karanganyar RW2		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	4.909,09
53	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	129			Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	253.933,79
54	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak	7	kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	14.805,00
55	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Kurang Baik	Tidak	Tidak	20	Jl. kel. Kembangsari			Pembelian	6.345,00
56	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Kurang Baik	Tidak	Tidak	20	Jl. Kel. Jagalan			Pembelian	77.300,00
57	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Kurang Baik	Tidak	Tidak	20	Jl. Kel. Kembangsari			Pembelian	42.300,00
58	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Kurang Baik	Tidak	Tidak	20	Jl. Kel. Kembangsari			Pembelian	52.875,00
59	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	5	JL batan timur raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	26.158,00
60	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak	Tidak	7	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	14.805,00

61	Permanen				8					16.920,00
	Bangunan Gedung	Baik	Tidak	Tidak		kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	
62	Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	9	kel kembangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	19.032,00
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen									
63	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	13	JL seteran miroto		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	68.010,80
64	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	18	JL seteran selatan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	94.168,80
65	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	14	JL seteran tengah		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	73.242,40
66	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	7	JL seteran serut		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	36.621,20
67	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak	252	Kel pindrikan lor		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	32.584,00
68	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	162	kel pekunden		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	81.696,98
69	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	162	kel brumbungan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	32.612,00
70	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Tidak	144	JL gang pinggir		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	30.001,43
71	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Tidak	144	jl kranngan dlm		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	44.667,07
72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Tidak	132	wotgandul dlm		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	21.246,44
73	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Tidak	57	kentangan barat		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	26.809,61
74	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Tidak		abimanyu raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	25.848,63
75	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak	788	rusun pekunden		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	25.837,22
76	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak	Tidak		JL karangsaru 9		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	13.200,00
77	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak	Tidak	238	JL kentangan barat		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	5.900,00
78	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak	Beton	285	JL kimangunsarkoro 116		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	440.237,03
79	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Beton	55	JL kapuran 548		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	88.600,00

	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen									
80	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak	Beton	55	JL kimangunsarkoro 116		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	352.649,19
81	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	Tidak	Tidak	40	jl kp kulitan, jagalan rt/rw 03/07		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	176.032,00
82	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kurang Baik	Tidak	Tidak	132	Jl taman seteran barat .		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	10.000,00
83	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	70	JL batan miroto 3		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	104.200,00
84	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	3	Kp patihan barat		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	7.100,00
85	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	Tidak	Tidak	6	Kp sonet RT6		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	5.700,00
86	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	20	Kp malang 309		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	11.400,00
87	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	Tidak	Tidak	18	JL di panjaitan RW5		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	12.400,00
88	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	Tidak	Tidak	98	JL kp kulitan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	11.000,00
89	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	Tidak	Tidak	2117	Jl.Taman Seteran barat No.1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	297.342,02
90	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Tidak	252	Jl. Tmn Seteran barat No.1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.370.707,83
91	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	28.8	Jl. Widosari Raya			Pembelian	24.866,00
92	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	10.4	Kelurahan Jagalan			Pembelian	69.466,85
93	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	35.7	Jl. Seteran Miroto RT 01 RW 01			Pembelian	28.935,91
94	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	21.4	Jl. Inspeksi		Tanah Milik Pemda	Pembelian	29.402,58
95	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	12.5	taman pekunden timur rt 04 rw 04			Pembelian	45.493,00
96	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak	9.96	kp. pompa			Pembelian	24.231,29
97										

98	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	83.8	kp.pompa		Tanah Milik Pemda	Pembelian	101.934,45
99	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton		Jln Inspeksi			Pembelian	99.482,00
100	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton		Jl.Ki.Mangunsarkoro RT.05 RW.01			Pembelian	24.838,00
101	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak		jl. pekunden tengah rw 2			Pembelian	32.658,00
102	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	18	jalan pekuden tengah rw 2			Pembelian	20.928,64
103	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	81	jalan pekuden tengah rw 2			Pembelian	48.552,91
104	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak	38	jalan pekuden tengah rw 2			Pembelian	53.496,47
105	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Rusak Berat				Jl. Sekayu Baru RT 01 RW 01			Pembelian	19.516,93
106	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik		Tidak	18	Wilayah RT 06 RW 02 (Jln. Taman			Pembelian	49.724,00
107	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Tidak	Beton	15	Brumbungan No. 9) Jl. Cipta Karya RT 01 RW 03			Pembelian	39.757,00
108	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Tidak	Beton	5.83	Jl. Karanganyar Sel RT 01 RW 01		Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.945,93
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Tidak	Beton	28	Kp. Malang RT 05 RW 04			Pembelian	49.862,00
109	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Tidak	Tidak	46.8	Bustaman RT 05 RW 03			Pembelian	26.007,13
110	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Tidak	Beton	15.831	Jl. Jagalan Selatan RT03 RW 01			Pembelian	30.653,66
111	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik		Tidak	31.71	KP TIM TIM RT 2 RW 4			Pembelian	129.009,78
112	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Tidak	Beton	16.831	Jl. Pringgading II RT 04 RW 01			Pembelian	56.170,42
113	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Tidak	Beton		Kp. Kertobangsan			Pembelian	23.899,87
114	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Bertingkat	Beton	6	Jl. Seteran Barat NO.1		Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.161,00
115	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Rusak Berat		Beton		Kelurahan Gabahan			Pembelian	203.421,65

116	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Rusak Berat	Tidak	Beton		Kelurahan Pendrikan Lor			Pembelian	203.154,28
117	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Rusak Berat	Tidak	Beton		Kelurahan Karangkidul			Pembelian	203.684,87
118	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Rusak Berat		Beton		Kelurahan Pendrikan Kidul			Pembelian	203.702,49
119	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Rusak Berat		Beton		Kelurahan Bangunharjo			Pembelian	203.257,91
120	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Rusak Berat		Beton		Kelurahan Brumbungan			Pembelian	201.668,22
121	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	Tidak	Beton	969	Jl.Seteran Barat No.1		Tanah Milik Pemda	Hibah	897.276,64
122	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	Tidak	Beton	472	Jl.Seteran Barat No.1			Hibah	156.012,03

Sumber: RKBMD Semarang Tengah, KIR 2025

2. 2 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Semarang Tengah.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Semarang Tengah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Semarang Tengah berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan kewilayahan yang disajikan pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah
Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TUJUAN																
1	Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah	angka	85	87	87.5	88	88.35	85	87	87.5	88	88.35	85	87	100	100	100
	SASARAN																
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	angka	NA	NA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN	%	NA	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	-	-	97	98	99	-	-	97	98	99	-	-	-	-	-
4	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	NA	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	-	83.36	85.04	86.72	-	-	83.36	85.04	86.72	-	-	100	100	100
6	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	-	-	90	92	95	-	-	90	92	95	-	-	100	100	100
	PROGRAM																
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
2	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
4	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
5	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
6	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
7	Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
8	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
9	Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan RT	%	90	90	-	-	-	90	90	-	-	-	100	100	-	-	-
10	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	angka	68	68	-	-	-	68	68	-	-	-	100	100	-	-	-
11	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	angka	11	3	-	-	-	9	3	-	-	-	81	100	-	-	-
12	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan Kelurahan)	angka	165	590	-	-	-	140	581	-	-	-	84	98,47	-	-	-
13	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	%	53	55	-	-	-	51	55	-	-	-	96,23	100	-	-	-
14	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	%	99	95	-	-	-	79,41	90	-	-	-	80,21	79,41	-	-	-
15	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	%	93	99,5	-	-	-	97	99,5	-	-	-	104,3	100	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
16	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar PATEN	%	12	100	-	-	-	9	100	-	-	-	100	100	-	-	-
17	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	angka	19500	14750	-	-	-	18225	14399	-	-	-	93,46	97,62	-	-	-
18	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	angka	15	15	-	-	-	15	15	-	-	-	100	100	-	-	-
19	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1001	100	-	-	-
20	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan	%	91	95,69	-	-	-	83	33	-	-	-	91	34,5	-	-	-
21	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	-	-	91	92	93	-	-	91	92	93	-	-	100	100	100
22	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	82,33	82,45	91	92	93	81,99	82,45	91	92	93	99,58	100	100	100	100
23	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	-	-	7	12	14	-	-	7	12	14	-	-	100	100	100
24	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	-	-	20	30	40		-	20	30	40	-	-	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator Lainnya																
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	NA	-	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	-	-	-	-
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	50	-	-	-	-	40	-	-	-	-	80	-	-	-	-
3	Nilai AKIP	angka															
21	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	-		91	92	93			91	92	93			100	100	100
22	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	-		91	92	93			91	92	93			100	100	100
23	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	-		7	12	14			7	12	14			100	100	100
24	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	-		20	30	40			20	30	40			100	100	100
	Indikator Lainnya																
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	NA	-	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	-	-	-	-
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	50	-	-	-	-	40	-	-	-	-	80%	-	-	-	-
3	Nilai AKIP	angka		68	68.5	69	69.3		69.73	75.61	78.85	79.1		102	110	114	114

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Semarang Tengah

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Semarang Tengah. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Semarang Tengah. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	JUMLAH BELANJA	17.682.072.000	36.557.072.011	44.321.719.095	53.385.746.578	52.593.266.244	16.874.529.763	31.711.282.185	42.871.051.946	51.534.816.281	48.778.092.163	**95,43**	**86,74**	**96,73**	**96,53**	**92.75**	**0,29**	**0,28**
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	295.209.000	-	-	-	-	293.889.000	-	-	-	-	99,55	0	0	0	0	-0,21	-0,17
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	192.390.000	-	-	-	-	192.390.000	-	-	-	-	100,00	0	0	0	0	-0,21	-0,09
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	25.425.000	-	-	-	-	23.604.800	-	-	-	-	92,84	0	0	0	0	-0,98	-0,99

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	5.876.272.000	-	-	-	-	5.715.312.300	-	-	-	-	97,26	0	0	0	0	-0,48	-0,48
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.542.249.000	-	-	-	-	8.911.562.493	-	-	-	-	93,39	0	0	0	0	1,37	1,38
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	737.742.000	-	-	-	-	725.936.170	-	-	-	-	98,40	0	0	0	0	-0,67	-0,63
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	218.640.000	-	-	-	-	217.690.000	-	-	-	-	99,57	0	0	0	0	-0,19	-0,19

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	794.145.000	-	-	-	-	794.145.000	-	-	-	-	100,00	0	0	0	0	-0,07	-0,03
	Program Peningkatan Intensifikasi PAD																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	13.377.532.071	18.613.503.102	20.901.204.538	21.395.601.337	-	10.667.852.769	18.135.552.403	19.889.780.093	20.426.971.568	-	79,74	97,43	95,16	95,47	0,18	0,27
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	8.999.663.990	3.746.739.767	3.694.902.300	3.863.966.322	-	8.130.889.316	3.544.954.023	3.531.522.429	3.741.449.531	-	90,35	94,61	95,58	96,83	-0,18	-0,17
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	13.845.275.950	21.911.592.322	28.684.684.740	27.217.698.585	-	12.588.538.900	21.144.304.020	28.012.863.759	24.497.521.064	-	90,92	96,50	97,66	90,01	0,28	0,29

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	334.600.000	36.683.904	22.500.000	33.600.000	-	324.001.200	33.160.750	20.100.000	29.750.000	-	96,83	90,40	89,33	88,54	-0,26	-0,27
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	13.200.000	82.455.000	82.400.000	-	-	13.080.750	80.550.000	82.400.000	-	-	99,10	97,69	100,00	2,62	2,59

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

c. Inovasi Kecamatan Semarang Tengah

Inovasi yang sudah dikembangkan dan diterapkan oleh Kecamatan Semarang Tengah dalam periode lalu diantaranya:

1. Kontra Strategi

Inovasi ini merupakan Koin Untuk Warga Semarang Tengah Kolaborasi Dengan Swasta, Lembaga, dan Instansi Terkait yang memiliki tujuan mengumpulkan koin untuk membantu warga Kecamatan Semarang Tengah.

2. SIP Gedang Mateng

Inovasi ini merupakan Sistem Penyewaan Gedung Serbaguna Dan Sport Center Semarang Tengah yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan fasilitas dan sebagai sarana penyewaan obyek retribusi Kecamatan Semarang Tengah.

3. Rumah Peluang

Inovasi ini merupakan program Penanganan Inklusi Anak Stunting yang diadakan setiap hari jumat dengan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk anak-anak stunting, sosialisasi penanganan stunting, dan pemeriksaan Kesehatan. Program ini merupakan kolaborasi antara OPD Kecamatan Semarang Tengah, Lembaga kemasyarakatan (PKK), dan Puskesmas.

4. Petis Jempol

Inovasi ini merupakan Pelayanan Gratis Jemput Bola dengan arti melakukan pelayanan gratis ke rumah warga warga di wilayah Kecamatan Semarang Tengah.

2.2.1. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Semarang Tengah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Tengah;
2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Semarang Tengah untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Peran kecamatan dan kelurahan yang semakin besar dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Digitalisasi Pelayanan) dan Keterbukaan Informasi;

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui keterlibatan aktif bisa menjadi pengawas, pendorong peningkatan layanan dan memotivasi perubahan.
4. Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan;
5. Pengembangan dan pengelolaan pendapatan kecamatan baik yang berupa pajak dan non pajak, seperti retribusi lapangan olahraga, retribusi umkm, dan sewa balai kecamatan.

2.2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Semarang Tengah.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Semarang Tengah diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Semarang Tengah telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah.

2.2.3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah **“Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan”**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Semarang Tengah terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **“Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan”**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah **“Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan”**.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif

   Data yang tersedia menunjukkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif belum optimal, dimana dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 80,00% pada Tahun 2020; 95,00% pada Tahun 2021; 97,00% pada Tahun 2022; 98,00% pada Tahun 2023; serta 99,00% pada Tahun 2024. Untuk

selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan.
Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.

b. Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan
Dalam kurun waktu tahun 2021-2024, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional mengalami fluktuasi yaitu sebesar 87,00% pada Tahun 2021; 90,00% pada Tahun 2022, 92,00% pada Tahun 2023; serta 95,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.
Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan serta sinergitas lintas sektor dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Tengah;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Tengah;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah;

g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Tengah;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Tengah;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Tengah;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Tengah;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
"Belum optimalnya tata kelola pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Tengah	belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah
2	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah	belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Tengah
		masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Tengah
3	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

2.2.4. TELAAHAN DOKUMEN LAINNYA

A. TELAAHAN RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar

hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"**KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF**"

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Misi 1 Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi

pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.**

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 **Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan**

Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 **Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga
menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 **Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.**

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan

program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu: **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif”** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.”**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat” (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat” (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran “Indeks Pelayanan Publik” (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang” (sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” (indicator sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu “Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah” (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Semarang Tengah secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Semarang Tengah dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut:

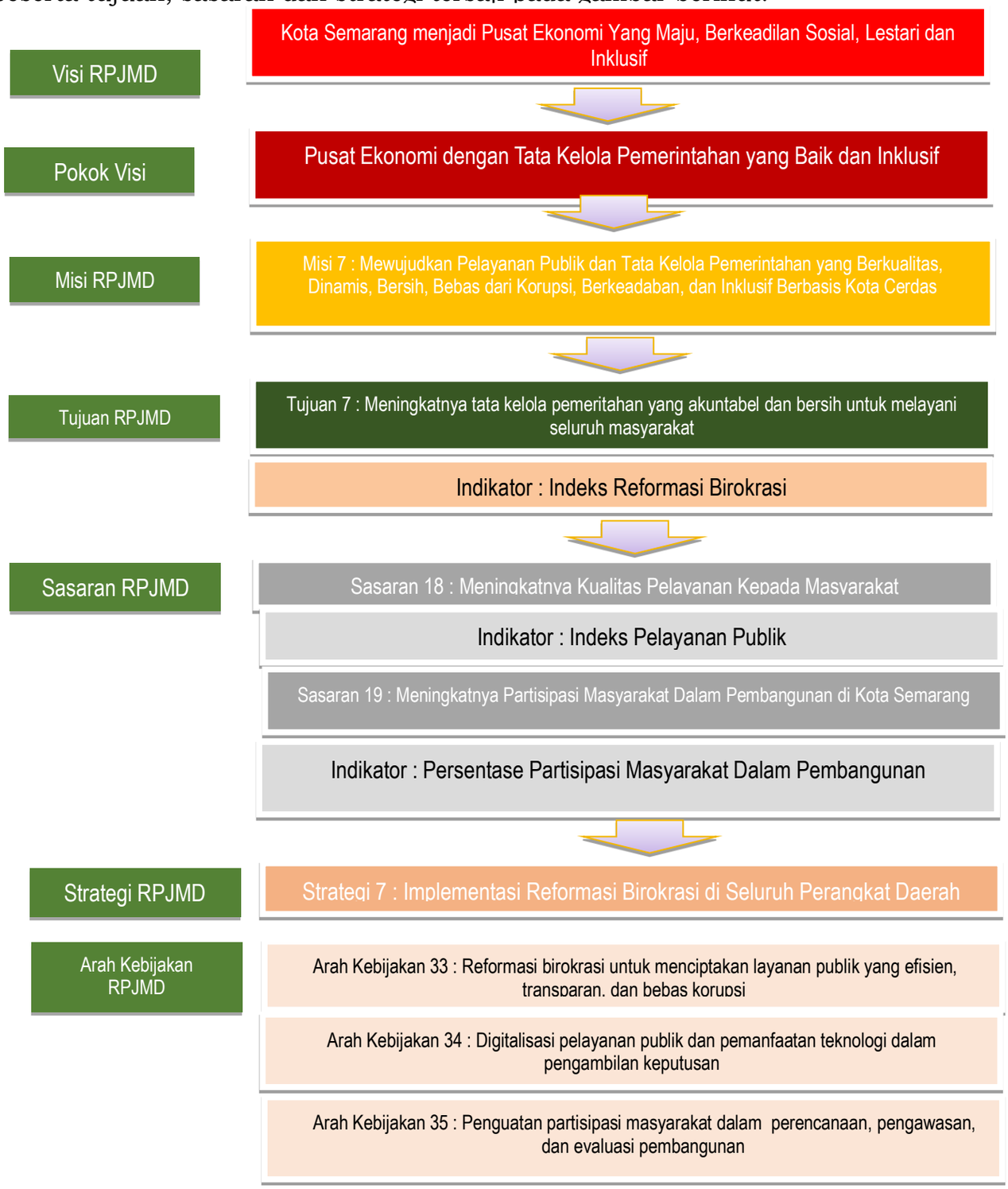

Gambar 2.10
Peranan Kecamatan Semarang Tengah dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

C. TELAAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Kecamatan Semarang Tengah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan di bidang kewilayahan, telah mendukung pengarusutamaan gender. Hal ini ditunjukkan dengan

dilakukannya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Pada tahun 2022, Kecamatan Semarang Tengah juga telah menunjukkan komitmen pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dengan menetapkan Tim Focal Point PUG Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 900/18/VII/2022. Di tahun 2024 Kecamatan Semarang Tengah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender, sebagaimana telah ditetapkan dalam Proba dan GBS.

Kecamatan Semarang Tengah berkomitmen mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi instrument penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender (ARG) diproyeksikan sebagai instrument perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunanmenjadi lebih tepat sasaran. Implementasi ARG juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan public serta meningkatkan partisipasi aktif laki-laki perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.

D. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/ LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Kecamatan Semarang Tengah tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian secara tidak langsung Kecamatan Semarang Tengah berkaitan karena merupakan wilayah pelaksana beberapa kebijakan baik level Provinsi maupun level Nasional. Keterkaitan tersebut diantaranya dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kota layak Anak

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terhadap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang public yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA.

2. Kecamatan Berdaya

Kecamatan Berdaya adalah program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) yang bertujuan memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan pemuda kreatif, dengan menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat, serta dunia usaha untuk pembangunan daerah. Program ini mengintegrasikan berbagai kegiatan, termasuk pelatihan ekonomi kreatif, perlindungan anak, fasilitasi disabilitas, dan penciptaan pusat-pusat kegiatan di tingkat kecamatan dan desa.

Tujuan Utama Program Kecamatan Berdaya:

- Memberdayakan Kelompok Rentan: fokus utama program ini adalah perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan anak muda kreatif.
- Memperkuat Partisipasi Publik: mendorong partisipasi aktif perempuan, anak, disabilitas, dan pemuda dalam pembangunan.
- Pusat Pembangunan Berkelanjutan: mengembangkan kecamatan sebagai pusat kemajuan perekonomian, kreativitas, dan wadah aspirasi masyarakat.
- Layanan Publik Responsif: menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap masalah di masyarakat.

Elemen dan Kegiatan Program:

- Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA): fasilitas yang diisi oleh kader PKK dan Muslimat untuk mendukung perempuan dan anak.
- Pelatihan dan Pendampingan: memberikan pelatihan keterampilan seperti rumah kreatif untuk merintis usaha dan pola asuh keluarga.
- Keterlibatan Perguruan Tinggi: melibatkan perguruan tinggi, untuk memberikan dukungan melalui pelatihan, sosialisasi, dan program KKN.
- Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI): sinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melindungi dan melindungi produk lokal berbasis budaya.
- Posbankum: Pos Bantuan Hukum yang hadir di tingkat desa dan kelurahan untuk memberikan akses pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Kecamatan Semarang Tengah merupakan salah satu *pilot project* di tahun 2025 (anggaran perubahan) bersama dengan empat kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Semarang Utara.

3. Posyandu 6 SPM

Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat terus diperkuat untuk memenuhi 6 layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan. Kecamatan Semarang Tengah berupaya mendukung revitalisasi Posyandu agar lebih terintegrasi, inovatif, dan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan berkesinambungan.

4. Kerukunan dan Harmonisasi Wilayah

Selain kerukunan umat beragama, harmonisasi wilayah menjadi isu strategis yang harus terus dijaga. Kecamatan Semarang Tengah sebagai kawasan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks menghadapi tantangan berupa potensi gesekan antarwarga, konflik kepentingan lahan, maupun perbedaan aspirasi pembangunan. Untuk itu, penguatan mekanisme mediasi, musyawarah, serta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan wilayah. Upaya harmonisasi ini juga mendukung terciptanya

lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

5. Ruang Bersama Indonesia (RBI)

Adalah gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dengan para pemangku kepentingan berbasis desa/ kelurahan, bersinergi menyelenggarakan program berperspektif perempuan dan anak, berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

RBI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender, peran perempuan, dan perlindungan anak melalui:

a) Pengurangan Kasur-kasur kekerasan terhadap perempuan dan anak (diskriminasi perempuan, KDRT, perdagangan orang, eksploitasi, penelentaraan anak, perkawinan anak, pengasuhan tidak layak, dan perlakuan salah lain);
b) Pelibatan dan peningkatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pembangunan;
c) Memperkuat Gerakan kolaboratif pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Sasaran Ruang Bersama Indonesia (RBI):

a) Memperkuat pemahaman dan kesadaran di lingkungan keluarga, masyarakat, dan aparat pemerintah tentang kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
b) Meningkatkan keterlibatan perempuan dan diakomodasinya pandangan anak dalam pengambilan keputusan dan struktur organisasi pemerintah desa dan masyarakat;
c) Meningkatkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan kasus-kasus ketidakadilan gender dan pemenuhan hak anak di tingkat desa/kelurahan;
e) Membangun gerakan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendorong gerakan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak;
f) Melahirkan berbagai peraturan dan kebijakan berperspektif kesetaraan gender dan menghormati hak anak.

E. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Dalam sistem pengembangan wilayah Kota, Kecamatan dikelompokkan dalam BWK yang meliputi:

a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa berskala internasional;
   - pusat pemerintahan Provinsi; dan
   - pusat pemerintahan Kota.
b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pusat pendidikan kepolisian; dan
   - pusat olahraga
c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - transportasi laut;
   - transportasi udara; dan
   - kantor pelayanan pemerintahan Provinsi
d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk; dengan rencana pengembangan fungsi utama berupa industri.
e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - jasa pertemuan dan pameran.
f. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang, dengan rencana pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi.
g. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perkantoran militer; dan
   - perdagangan dan jasa.
h. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pendidikan tinggi; dan
   - paru-paru Kota.
i. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
   - paru-paru Kota.
j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu, dengan rencana pengembangan fungsi utama:
   - perdagangan dan jasa; dan
   - industri.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Semarang Tengah masuk dalam wilayah BWK I, dengan rencana pengembangan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional.

Sedangkan untuk rencana struktur ruang Kecamatan Semarang Tengah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota, dilengkapi dengan sarana prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan Kota dan/ atau Regional. Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.
2. Pusat Lingkungan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala pelayanan lingkungan permukiman. Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di Kecamatan Semarang Tengah yaitu pusat lingkungan I.1 yang berada di Kelurahan Sekayu dengan daerah pelayanan Kelurahan Pindrikan Lor, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Kembang Sari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Purwodinatan, Kelurahan Miroto, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Karang Kidul;

F. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah. Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Kecamatan Semarang Tengah tidak dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (5) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan masalah strategis "**Belum optimalnya pelayanan publik yang "transparan dan akuntabel**", dan isu strategis "**Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik,**

demokratis, dan bertanggungjawab", seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Kecamatan Semarang Tengah adalah terkait perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Tabel 2.8.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Pilar	Masalah Strategis	Isu Strategis
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Tabel 2.9.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 Kecamatan Semarang Tengah

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
	NIHIL								

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

2.2.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah adalah isu strategis ke tujuh, yaitu “Penyelenggaraan *Good Governance*”. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu: “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Semarang Tengah, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Isu Strategis Kecamatan Semarang Tengah
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Tengah	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Semarang Tengah						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah
		belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Semarang Tengah						peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Semarang Tengah

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Semarang Tengah dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal “Reformasi Birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi”; “Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan”; “Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan”.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah “**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**”, dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.**

3.1. TUJUAN dan SASARAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Semarang Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang kewilayahan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari

keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Semarang Tengah.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu:

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yaitu:

1. **"Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Kecamatan Semarang Tengah"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).

2. **"Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Semarang Tengah"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu: Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dimana Kecamatan Semarang Tengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Semarang Tengah.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Semarang Tengah maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu:

SASARAN 1	**:**	**Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah**
Indikator	:	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Tengah. Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP Kecamatan Semarang Tengah untuk komponen

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Capaian Kinerja.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
   Indikator ini diukur dari nilai yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah

Indikator : Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Tengah.
Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan layanan terkait pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional.

SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan

Indikator : Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan.
Indikator ini diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Semarang Tengah.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Tengah	Angka	90	91	92	93	94	95	Agregat dari capaian IKM Asikmas (60%), Tingkat Efektivitas kecamatan dalam menangani pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum (20%), pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan (20%)
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Tengah	Angka	80	81	82	83	84	85	Agregat dari kepengurusan aktif (20%), partisipasi musrenbang dari seluruh elemen masyarakat (30%), dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											efektivitas kegiatan yang berdampak sosial, ekonomi, lingkungan (50%)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Tengah	Nilai	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77	Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	Angka	88.35	93	94	95	96	97	Nilai yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi
		Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan Semarang Tengah	Persen	95	96	97	98	99	100	Jumlah layanan terkait pelayanan publik, ketrentaman dan ketertiban umum serta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang tepat waktu sesuai SOP/jumlah seluruh layanan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah	Nilai	80	81	82	83	84	85	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap LK

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

3.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Semarang Tengah mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Semarang Tengah dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Sinkronisasi optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	Penguatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	Percepatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	Perwujudan Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah
Sinkronisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	Optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	Penguatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	Percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	Perwujudan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Sinkronisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	Optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	Penguatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	Percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	Perwujudan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah

3.2.2. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Semarang Tengah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Semarang Tengah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi 1 **Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah;
(b) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Tengah;
(c) peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(c) peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah;
(d) peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
(e) peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah;
(f) peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Tengah;
(g) peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Tengah;

(h) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Tengah.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

(a) peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah;
(b) peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Tengah;
(c) peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah;
(d) peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Tengah	
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah	
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Tengah	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya	

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Tengah	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Tengah	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Tengah
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Semarang Tengah
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Semarang Tengah

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Semarang Tengah
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Semarang Tengah
			3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Tengah

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Semarang Tengah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Semarang Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan**		Camat Semarang Tengah
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		S1:Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Tengah		Camat Semarang Tengah
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		Camat Semarang Tengah
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekcam Semarang Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Tengah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag PEK
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf PEK
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf PEK
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf PEK

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf PEK
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf PEK
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf PEK
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf PEK

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag PEK
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf PEK
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf PEK
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf PEK

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf PEK
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf PEK
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah		Sekcam Semarang Tengah
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Tengah	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Umpeg

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umpeg
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umpeg
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umpeg
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umpeg
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umpeg
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umpeg
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umpeg

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Konsultasi SKPD			
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umpeg
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umpeg
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umpeg
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Tengah yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umpeg

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kecamatan Semarang Tengah			
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umpeg
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umpeg
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umpeg
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umpeg
				Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umpeg

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umpeg
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan		Camat Semarang Tengah
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat Semarang Tengah
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Reksos
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Reksos

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kasi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	StafPemerintahan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kasi Pelayanan Publik Kec
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Miroto

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Miroto)	Seklur Miroto, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Brumbungan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Brumbungan)	Seklur Brumbungan, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Jagalan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jagalan)	Seklur Jagalan, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kranggan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kranggan)	Seklur Kranggan, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Gabahan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gabahan)	Seklur Gabahan, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kembangsari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur Kembangsari, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kelurahan Kembangsari)	
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Sekayu
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sekayu)	Seklur Sekayu, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Pandansari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandansari)	Seklur Pandansari, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bangunharjo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bangunharjo)	Seklur Bangunharjo, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kauman
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kauman)	Seklur Kauman, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Purwodinatan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwodinatan)	Seklur Purwodinatan, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Karangkidul
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangkidul)	Seklur Karangkidul, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Pekunden
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pekunden)	Seklur Pekunden, Staf Kel
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Pendrikan Kidul
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur Pendrikan Kidul, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kelurahan Pindrikan Kidul)	
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Pendrikan Lor
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pindrikan Lor)	Seklur Pendrikan Lor, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pembangunan Kecamatan, Lurah
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Miroto

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kewenangan camat			
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Miroto)	Kasi Pembangunan Kel Miroto, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Brumbungan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Brumbungan)	Kasi Pembangunan Kel. Brumbungan, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Jagalan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jagalan)	Kasi Pembangunan Kel. Jagalan, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kranggan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kranggan)	Kasi Pembangunan Kel. Kranggan, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Gabahan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gabahan)	Kasi Pembangunan Kel. Gabahan, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kembangsari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kewenangan camat			
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kembangsari)	Kasi Pembangunan Kel. Kembangsari, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Sekayu
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Sekayu)	Kasi Pembangunan Kel. Sekayu, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pandansari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pandansari)	Kasi Pembangunan Kel. Pandansari, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bangunharjo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bangunharjo)	Kasi Pembangunan Kel. Bangunharjo, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kauman
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kauman)	Kasi Pembangunan Kel. Kauman, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Purwodinatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kewenangan camat			
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Purwodinatan)	Kasi Pembangunan Kel. Purwodinatan, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Karangkidul
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangkidul)	Kasi Pembangunan Kel. Karangkidul, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pekunden
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pekunden)	Kasi Pembangunan Kel. Pekunden, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pendrikan Kidul
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pindrikan Kidul)	Kasi Pembangunan Kel. Pendrikan Kidul, Staf Kel
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pendrikan Lor
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pindrikan Lor)	Kasi Pembangunan Kel. Pendrikan Lor, Staf Kel
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Camat Semarang Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			aman dan tertib di Kecamatan Semarang Tengah				
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib Kecamatan
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Trantib Kecamatan
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Tengah		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat Semarang Tengah
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Pemerintahan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sesuai arahan kepala daerah			
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Pemerintahan Kecamatan
					Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan		Camat Semarang Tengah
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang		S3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		Camat Semarang Tengah
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat Semarang Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kec)	Kasi Pembangunan Kec
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Pembangunan Kec
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kec)	Kasi Reksos Kec
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Reksos Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Miroto
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Miroto)	Kasi Reksos Miroto, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Brumbungan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Brumbungan)	Kasi Reksos Brumbungan, Staf Kel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Jagalan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jagalan)	Kasi Reksos Jagalan, Staf Kel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kranggan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kranggan)	Kasi Reksos Kranggan, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Gabahan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gabahan)	Kasi Reksos Gabahan, Staf Kel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kembangsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kembangsari)	Kasi Reksos Kembangsari, Staf Kel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Sekayu
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekayu)	Kasi Reksos Sekayu, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Pandansari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandansari)	Kasi Reksos Pandansari, Staf Kel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bangunharjo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bangunharjo)	Kasi Reksos Bangunharjo, Staf Kel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kauman
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kauman)	Kasi Reksos Kauman, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Purwodinatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwodinatan)	Kasi Reksos Purwodinatan, Staf Kel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Karangkidul
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangkidul)	Kasi Reksos Karangkidul, Staf Kel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Pekunden
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pekunden)	Kasi Reksos Pekunden, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Pendrikan Kidul
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pendrikan Kidul)	Kasi Reksos Pendrikan Kidul, Staf Kel
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kec dan kel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Pendrikan Lor
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pendrikan Lor)	Kasi Reksos Pendrikan Lor, Staf Kel
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi Reksos Kec, Kasi Pemerintahan Kec
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Reksos dan Staf Pemerintahan Kec

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Miroto
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Miroto)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Miroto, Staf Kel
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Brumbungan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Brumbungan)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Brumbungan, Staf Kel
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Jagalan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jagalan)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Jagalan, Staf Kel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kranggan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kranggan)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Kranggan, Staf Kel
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Gabahan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gabahan)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Gabahan, Staf Kelurahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kembangsari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kembangsari)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Kembangsari, Staf Kelurahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Sekayu
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sekayu)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Sekayu, Staf Kelurahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pandansari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pandansari)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Pandansari, Staf Kelurahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bangunharjo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bangunharjo)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Bangunharjo, Staf Kelurahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kauman
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kauman)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Kauman, Staf Kelurahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Purwodinatan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwodinatan)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Purwodinatan, Staf Kelurahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Karangkidul
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangkidul)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Karangkidul, Staf Kelurahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pekunden
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pekunden)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Pekunden, Staf Kelurahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pendrikan Kidul
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pendrikan Kidul)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Pendrikan Kidul, Staf Kelurahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pendrikan Lor
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pendrikan Lor)	Kasi Reksos & Kasi Pemerintahan Trantib Pendrikan Lor, Staf Kelurahan
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi Reksos Kec

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan instansi terkait			
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Reksos Kec
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi Reksos Kec
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Reksos Kec

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu:

1. Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan;
2. Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan;
3. Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling);
4. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW;
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang;
6. Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil;
7. Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi;
8. Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK.

Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling)	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
4.	Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5.	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil			
7.	Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi			
8.	Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Semarang Tengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud

operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah terdapat pada lampiran Tabel 4.3. Sedangkan untuk rencana pendapatan ditampilkan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 – 2030

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
KEWILAYAHAN				51.539.246.867		55.683.537.432		57.487.325.588		57.818.655.843		58.600.195.293	
KECAMATAN SEMARANG TENGAH				51.539.246.867		55.683.537.432		57.487.325.588		57.818.655.843		58.600.195.293	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.896.812.327		2.297.000.000		2.381.050.706		2.216.710.319		2.268.733.777	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				60.000.000		72.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.000.000		12.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1.400.000.000		1.475.000.000		1.475.000.000		1.475.000.000		1.522.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Kec
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Miroto

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Brumbungan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Jagalan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Kranggan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Gabahan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Kembangsari
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Sekayu
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Pandansari
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Bangunharjo

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Kaumman
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Purwodinatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Karangkidul
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Pekunden

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Pindrikan Kidul
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Pindrikan Lor
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.400.000.000	0	1.475.000.000	0	1.475.000.000	0	1.475.000.000	0	1.522.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	90.000.000	Miroto
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Brumbungan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Jagalan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Krangan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Gabahan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Kembangsari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Sekayu
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Pandansari
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Bangunharjo
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Kaumman
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Purwodinatan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Karangkidul

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Pekunden
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Pindrikan Kidul
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	Pindrikan Lor
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				436.812.327		750.000.000		822.050.706		657.710.319		662.733.777	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Kec
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Miroto
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Brumbungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Dilimpahkan kepada Camat												
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Jagalan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Kranggan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Gabahan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Kembangsari
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Sekayu
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Pandansari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Bangunharjo
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Kauman
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Purwodinatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Karangkidul
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Pekunden
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Pindrikan Kidul
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		Pindrikan Lor

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				436.812.327		750.000.000		822.050.706		657.710.319		662.733.777	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	12 laporan	136.812.327	12 laporan	300.000.000	12 laporan	222.050.706	12 laporan	132.710.319	12 laporan	137.733.777	Kec
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Miroto
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Brumbungan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Jagalan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Krangan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Gabahan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Kembangsari
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Sekayu
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Pandansari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun									Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Bangunharjo
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Kauman
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Purwodinatan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Karangkidul
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Pekunden
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Pindrikan Kidul
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	Pindrikan Lor
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				25.008.485.974		26.232.441.600		26.696.622.016		26.740.675.377		26.498.941.600	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	99%	100%		100%		100%		100%		100 %		
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.598.400.000		1.806.900.000		1.912.400.000		2.074.400.000		2.126.400.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	150 kegiatan		152 kegiatan		154 kegiatan		156 kegiatan		158 kegiatan		Kec
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	15 kegiatan		17 kegiatan		19 kegiatan		21 kegiatan		23 kegiatan		Miroto
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Brumbungan
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Jagalan
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Kranggan
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Gabahan
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Kembangsari
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Sekayu
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Pandansari
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Bangunharjo
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Kauman
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Purwodinatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Karangkidul
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Pekunden
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Pindrikan Kidul
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		Pindrikan Lor
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				58.000.000		60.000.000		62.000.000		64.000.000		66.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kecamatan	9 lembaga	6 lembaga	58.000.000	6 lembaga	60.000.000	6 lembaga	62.000.000	6 lembaga	64.000.000	6 lembaga	66.000.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.540.400.000		1.746.900.000		1.850.400.000		2.010.400.000		2.060.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	530.000.000	4 Pokmas/Ormas	586.500.000	4 Pokmas/Ormas	540.000.000	4 Pokmas/Ormas	550.000.000	4 Pokmas/Ormas	450.000.000	Kecamatan
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	66.800.000	6 Pokmas/Ormas	76.800.000	6 Pokmas/Ormas	86.800.000	6 Pokmas/Ormas	96.800.000	6 Pokmas/Ormas	106.800.000	Miroto

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Masyarakat di Kelurahan												
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	58.400.000	6 Pokmas/Ormas	68.400.000	6 Pokmas/Ormas	78.400.000	6 Pokmas/Ormas	88.400.000	6 Pokmas/Ormas	98.400.000	Brumbungan
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	75.200.000	6 Pokmas/Ormas	85.200.000	6 Pokmas/Ormas	95.200.000	6 Pokmas/Ormas	105.200.000	6 Pokmas/Ormas	115.200.000	Jagalan
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	58.400.000	6 Pokmas/Ormas	68.400.000	6 Pokmas/Ormas	78.400.000	6 Pokmas/Ormas	88.400.000	6 Pokmas/Ormas	98.400.000	Krangan
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	79.400.000	6 Pokmas/Ormas	89.400.000	6 Pokmas/Ormas	99.400.000	6 Pokmas/Ormas	109.400.000	6 Pokmas/Ormas	119.400.000	Gabahan
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	66.800.000	6 Pokmas/Ormas	76.800.000	6 Pokmas/Ormas	86.800.000	6 Pokmas/Ormas	96.800.000	6 Pokmas/Ormas	106.800.000	Kembangsari
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	58.400.000	6 Pokmas/Ormas	68.400.000	6 Pokmas/Ormas	78.400.000	6 Pokmas/Ormas	88.400.000	6 Pokmas/Ormas	98.400.000	Sekayu

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	66.800.000	6 Pokmas/Ormas	76.800.000	6 Pokmas/Ormas	86.800.000	6 Pokmas/Ormas	96.800.000	6 Pokmas/Ormas	106.800.000	Pandansari
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	62.600.000	6 Pokmas/Ormas	72.600.000	6 Pokmas/Ormas	82.600.000	6 Pokmas/Ormas	92.600.000	6 Pokmas/Ormas	102.600.000	Bangunharjo
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	62.600.000	6 Pokmas/Ormas	72.600.000	6 Pokmas/Ormas	82.600.000	6 Pokmas/Ormas	92.600.000	6 Pokmas/Ormas	102.600.000	Kauman
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	75.200.000	6 Pokmas/Ormas	85.200.000	6 Pokmas/Ormas	95.200.000	6 Pokmas/Ormas	105.200.000	6 Pokmas/Ormas	115.200.000	Purwodinatan
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	66.800.000	6 Pokmas/Ormas	76.800.000	6 Pokmas/Ormas	86.800.000	6 Pokmas/Ormas	96.800.000	6 Pokmas/Ormas	106.800.000	Karangkidul
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	62.600.000	6 Pokmas/Ormas	72.600.000	6 Pokmas/Ormas	82.600.000	6 Pokmas/Ormas	92.600.000	6 Pokmas/Ormas	102.600.000	Pekunden
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	71.000.000	6 Pokmas/Ormas	81.000.000	6 Pokmas/Ormas	91.000.000	6 Pokmas/Ormas	101.000.000	6 Pokmas/Ormas	111.000.000	Pindrikan Kidul

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	79.400.000	6 Pokmas/Ormas	89.400.000	6 Pokmas/Ormas	99.400.000	6 Pokmas/Ormas	109.400.000	6 Pokmas/Ormas	119.400.000	Pindrikan Lor
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				23.410.085.974		24.425.541.600		24.784.222.016		24.666.275.377		24.372.541.600	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Kec
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Miroto
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Brumbungan
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Jagalan
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Krangan
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Gabahan
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Kembangsari
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Sekayu

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Pandansari
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Bangunharjo
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Kauman
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Purwodinatan
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Karangkidul
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Pekunden
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Pindrikan Kidul
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		Pindrikan Lor
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				23.077.040.000		24.008.041.600		24.256.722.016		24.278.775.377		24.005.041.600	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	4 lembaga	127.000.000	4 lembaga	140.000.000	4 lembaga	150.000.000	4 lembaga	160.000.000	4 lembaga	137.000.000	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.965.480.000	6 lembaga	2.044.099.200	6 lembaga	2.064.540.192	6 lembaga	2.065.572.462	6 lembaga	2.044.099.200	Miroto
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.658.600.000	6 lembaga	1.724.944.000	6 lembaga	1.742.193.440	6 lembaga	1.743.064.537	6 lembaga	1.724.944.000	Brumbungan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.945.120.000	6 lembaga	2.022.924.800	6 lembaga	2.043.154.048	6 lembaga	2.044.175.625	6 lembaga	2.022.924.800	Jagalan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.439.400.000	6 lembaga	1.496.976.000	6 lembaga	1.511.945.760	6 lembaga	1.512.701.733	6 lembaga	1.496.976.000	Krangan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	2.119.440.000	6 lembaga	2.204.217.600	6 lembaga	2.226.259.776	6 lembaga	2.227.372.906	6 lembaga	2.204.217.600	Gabahan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.570.920.000	6 lembaga	1.633.756.800	6 lembaga	1.650.094.368	6 lembaga	1.650.919.415	6 lembaga	1.633.756.800	Kembangsari
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	956.120.000	6 lembaga	994.364.800	6 lembaga	1.004.308.448	6 lembaga	1.004.810.602	6 lembaga	994.364.800	Sekayu
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.087.640.000	6 lembaga	1.131.145.600	6 lembaga	1.142.457.056	6 lembaga	1.143.028.285	6 lembaga	1.131.145.600	Pandansari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.153.920.000	6 lembaga	1.200.076.800	6 lembaga	1.212.077.568	6 lembaga	1.212.683.607	6 lembaga	1.200.076.800	Bangunharjo
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	869.480.000	6 lembaga	904.259.200	6 lembaga	913.301.792	6 lembaga	913.758.443	6 lembaga	904.259.200	Kauman
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.637.200.000	6 lembaga	1.702.688.000	6 lembaga	1.719.714.880	6 lembaga	1.720.574.737	6 lembaga	1.702.688.000	Purwodinatan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.329.280.000	6 lembaga	1.382.451.200	6 lembaga	1.396.275.712	6 lembaga	1.396.973.850	6 lembaga	1.382.451.200	Karangkidul
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.570.920.000	6 lembaga	1.633.756.800	6 lembaga	1.650.094.368	6 lembaga	1.650.919.415	6 lembaga	1.633.756.800	Pekunden
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	1.614.760.000	6 lembaga	1.679.350.400	6 lembaga	1.696.143.904	6 lembaga	1.696.991.976	6 lembaga	1.679.350.400	Pindrikan Kidul
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 lembaga	2.031.760.000	6 lembaga	2.113.030.400	6 lembaga	2.134.160.704	6 lembaga	2.135.227.784	6 lembaga	2.113.030.400	Pindrikan Lor
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				7.500.000		17.500.000		27.500.000		37.500.000		37.500.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				325.545.974		400.000.000		500.000.000		350.000.000		330.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun									Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				33.744.475		37.314.493		38.868.331		39.153.749		39.826.991	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				33.744.475		37.314.493		38.868.331		39.153.749		39.826.991	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	NA	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				33.744.475		37.314.493		38.868.331		39.153.749		39.826.991	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	2 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun									Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Vertikal di Wilayah Kecamatan											
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				82.754.308		91.509.352		95.319.954		96.019.908		97.670.953	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Tengah	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	80%	82%		84%		86%		88%		90%		
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				82.754.308		91.509.352		95.319.954		96.019.908		97.670.953	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				82.754.308		91.509.352		95.319.954		96.019.908		97.670.953	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				24.517.449.783		27.025.271.987		28.275.464.581		28.726.096.490		29.695.021.972	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				82.060.400		81.060.400		81.060.400		81.060.400		81.060.400	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Tengah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	NA	100%		100%		100%		100%		100 %		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.175.200		15.175.200		15.175.200		15.175.200		15.175.200	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.650.000		4.650.000		4.650.000		4.650.000		4.650.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.650.000		4.650.000		4.650.000		4.650.000		4.650.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.766.900		1.766.900		1.766.900		1.766.900		1.766.900	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.856.900		1.856.900		1.856.900		1.856.900		1.856.900	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.961.400		2.961.400		2.961.400		2.961.400		2.961.400	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 laporan	5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	NA	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.933.328.468		23.001.157.041		24.112.826.337		25.288.098.124		26.512.517.053	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	NA	100%		100%		100%		100%		100 %		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.137.984.268		22.194.812.841		23.304.482.137		24.469.634.184		25.693.043.113	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	100 orang /bulan	103 orang /bulan		103 orang /bulan		103 orang /bulan		103 orang /bulan		103 orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				787.760.000		797.760.000		798.760.000		808.760.000		809.760.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.261.400		4.261.400		5.261.400		5.381.140		5.391.140	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.511.400		2.511.400		2.511.400		2.511.400		2.511.400	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun									Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.811.400		1.811.400		1.811.400		1.811.400		1.811.400	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.000.000		13.200.000		14.400.000		15.600.000		16.800.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Tengah	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	NA	89 angka		90 angka		91 angka		92 angka		93 angka		
7.01.01.2.05. 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.000.000		2.200.000		2.400.000		2.600.000		2.800.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	NA	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.257.735		398.836.321		1.016.336.321		629.336.321		392.836.321	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.500.000		30.500.000		37.500.000		40.000.000		42.500.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45 paket	45 paket		45 paket		45 paket		45 paket		45 paket		
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.421.414		8.000.000		8.500.000		9.000.000		10.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5 paket	25 paket		25 paket		25 paket		25 paket		25 paket		
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.325.000		50.325.000		60.325.000		70.325.000		80.325.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.011.321		110.011.321		110.011.321		110.011.321		110.011.321	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		200.000.000		800.000.000		400.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000		1.083.968.530		721.392.848		300.000.000		320.000.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	NA	100%		100%		100%		100%		100 %		
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		1.083.968.530		721.392.848		300.000.000		320.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.664.651.480		1.684.897.995		1.705.296.975		1.725.849.944		1.746.558.444	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Tengah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Tengah yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.000.000		145.000.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.524.651.480		1.539.897.995		1.555.296.975		1.570.849.945		1.586.558.444	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				500.151.700		762.151.700		624.151.700		686.151.700		625.249.754	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100 %		
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				321.151.700		331.151.700		341.151.700		351.151.700		361.151.700	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50 unit	52 unit		52 unit		52 unit		52 unit		52 unit		
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.000.000		31.000.000		33.000.000		35.000.000		37.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	25 unit		25 unit		25 unit		25 unit		25 unit		
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		400.000.000		250.000.000		300.000.000		227.098.054	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit (gd kantor, lapangan (3), rumah inspirasi)	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rek	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp53.568.000,00	Rp54.000.000,00	Rp55.000.000,00	Rp56.000.000,00	Rp57.000.000,00	Rp58.000.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp53.568.000,00	Rp54.000.000,00	Rp55.000.000,00	Rp56.000.000,00	Rp57.000.000,00	Rp58.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp53.568.000,00	Rp54.000.000,00	Rp55.000.000,00	Rp56.000.000,00	Rp57.000.000,00	Rp58.000.000,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	Rp53.568.000,00	Rp54.000.000,00	Rp55.000.000,00	Rp56.000.000,00	Rp57.000.000,00	Rp58.000.000,00	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	
	Sewa Lapangan Sport Center Semarang Tengah	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp14.000.000,00	
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp14.000.000,00	
	SEWA KIOS UMKM SETERAN PUJA SERA SEMARANG TENGAH (DEPAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH)	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp14.000.000,00	

Kode Rek	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp13.568.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp13.568.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	
	Sewa Gedung Kecamatan Semarang Tengah	Rp13.568.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Tengah yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan : Meningkatkan Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah									
	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Tengah	Angka	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan									
	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	
	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan	Angka	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan									
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Unsur Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Semarang Tengah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Semarang Tengah. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Semarang Tengah ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Semarang Tengah.

Permasalahan kewilayahan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Semarang Tengah. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Semarang Tengah.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan kewilayahan yang baik, humanis, dan inklusif.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Semarang Tengah. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Semarang Tengah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

41. KECAMATAN GUNUNGPATI

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan maka Kecamatan Gunungpati wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang. Atas dasar tersebut, Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya urusan kewilayahan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Kecamatan Gunungpati.

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

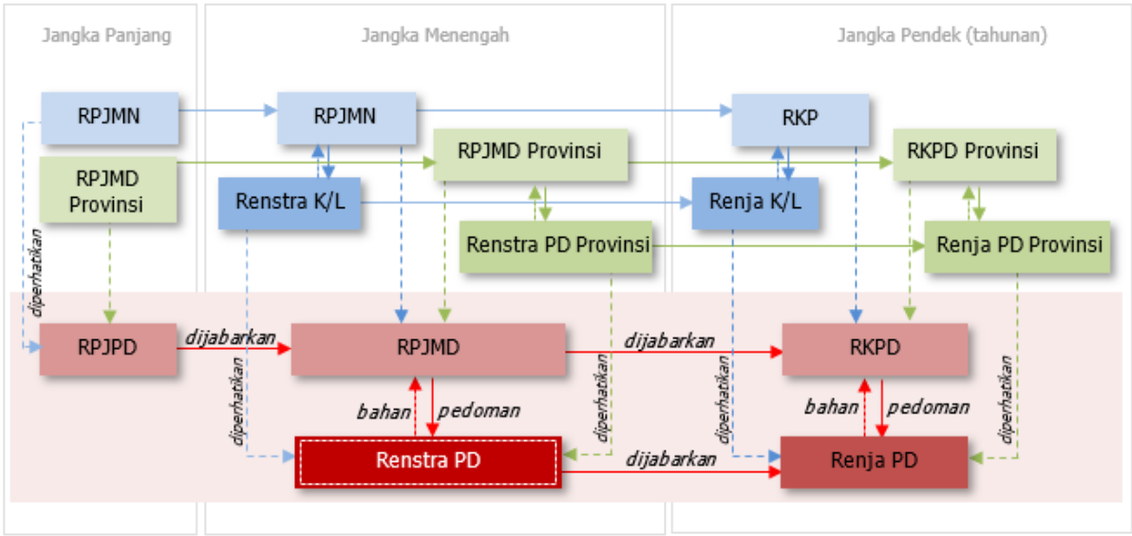

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kota Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
27. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60) ;
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
29. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 37);
30. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 900.1/67 Tahun 2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Gunungpati adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* urusan penunjang kewilayahan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpati adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya urusan penunjang kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungpati, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gunungpati. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gunungpati yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.5. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.5.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 47 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, tugas pokok dari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu, Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Secara rinci tugas camat dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5. penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

15. penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16. penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
17. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
18. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
19. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
    a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
    c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    d. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    e. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
    g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
    h. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
    a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
    b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
    d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:
    a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
   a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
   b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
   a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
   a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   b. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   c. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   d. Evaluasi Kelurahan;
9. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
   a. Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
   b. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   c. Peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   d. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   e. Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
   f. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

g. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
h. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
i. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
j. Pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
k. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
l. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;

10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
    a. Pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
    b. Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
    c. Pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
    d. Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan;
11. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan, antara lain:
    a. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
    b. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
    c. Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
    d. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
    e. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
12. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
    a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
13. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
    a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
    b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
    c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
14. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gunungpati telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

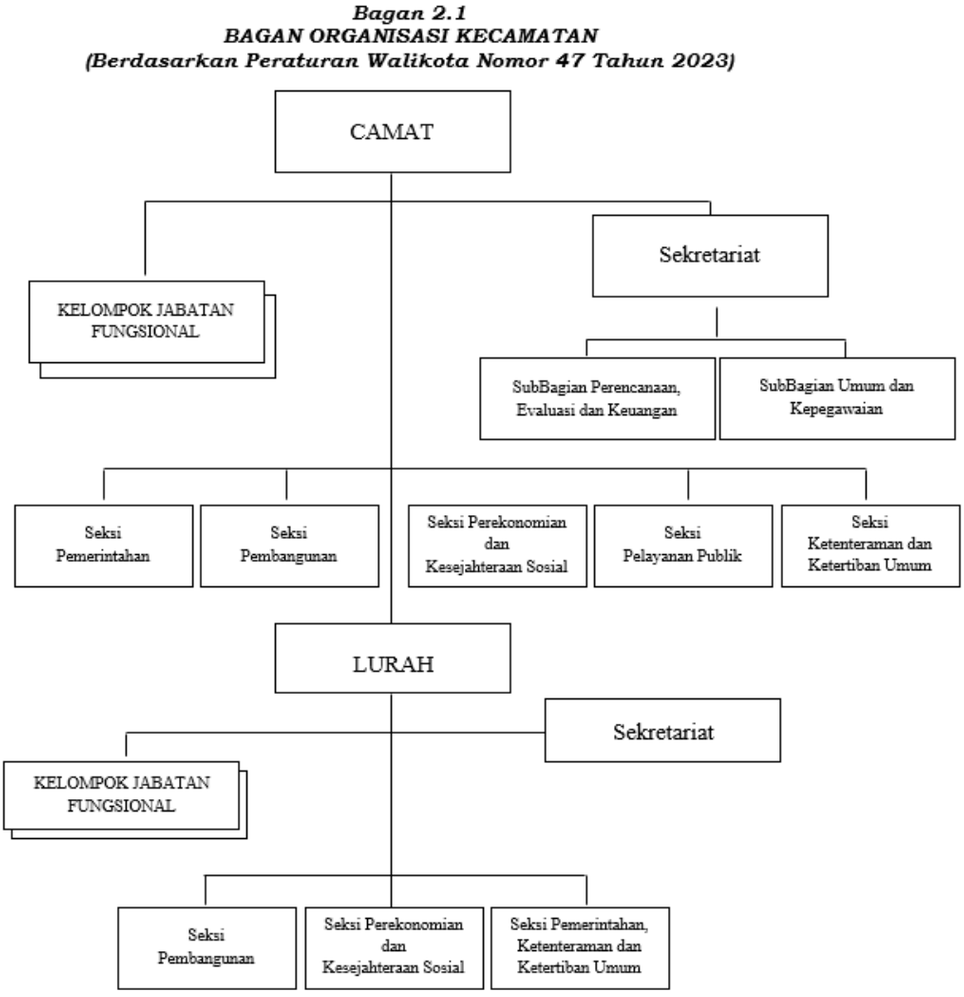

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Gunungpati

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

1. Camat;
   Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Sekretariat
   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.
   Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

4. Seksi Pembangunan;
   Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
   Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
6. Seksi Pelayanan Publik;
   Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
   Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.
8. Jabatan Fungsional.
   Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Kelurahan, terdiri atas:
   a. Lurah;
      Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

   b. Sekretariat;
      Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi

pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

c. Seksi Pembangunan;
Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.

d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.

e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

1.5.2. Sumber Daya Kecamatan Gunungpati

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh Kecamatan Gunungpati, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja Kecamatan Gunungpati.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Kecamatan Gunungpati di klasifikasikan ke dalam ASN (PNS dan PPPK) serta Penyedia Jasa Lainnya Peroranggan (PJLP). Jumlah Pegawai di Kecamatan Gunungpati per 31 Juli 2025 adalah sebanyak 162 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 105 orang, PPPK sebanyak 32 orang dan PJLP sebanyak 25 orang. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Kecamatan Gunungpati Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		PJLP		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD							
2	SMP Sederajat							
3	SMA Sederajat	3		9	7	19	2	40
4	D3	7	20	1	3	0	0	31

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		PJLP		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
5	S1	43	18	9	3	1	3	77
6	S2	10	4					14
7	S3							

Keterangan:
*) *Data Per 31 Juli 2025*

Dari jumlah pegawai ASN sebanyak 137 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

PNS				
No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	5	20	25
2	Golongan III	54	23	77
3	Golongan IV	3		3
				105
PPPK				
No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan V	9	7	16
2	Golongan VII	1	3	4
3	Golongan IX	9	3	12
				32

Keterangan:
*) *Data Per 31 Juli 2025*

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Gunungpati berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset Tanah Kecamatan Gunungpati

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
1	Tanah Tegalan	3.850	1963	Jetis RW 3				Lapangan Sepak Bola		Rp 109.500.000,00	P. 108
2	Tanah Lapangan Tenis	6.151	2011	Jl. Kandri Selatan RT 02 RW 01		8/24/2007	HP. 12	Lapangan Olah Raga		Rp 57.720.000,00	Ps. 43 / S II - Lain-Lain
3	Tanah Kering Lainnya	5.660	1979	Desel RT. 01 RW 03 (dekat Kuburan Desel)		12/13/1997	286	Tanah Kosong		Rp 25.470.000,00	
4	Tanah Sawah Irigasi	15.700	1945	Jl. Kyai Cagak Luas Patemon RT 2 RW 1				Lapangan		Rp 459.100.000,00	P. 34/SII
5	Tanah Sawah Irigasi	7.627	1981	Jl. Randusari RT 01 RW II Kel. Nongkosawit		4/28/2016	HP 10	Lapangan		Rp 262.300.000,00	P.46/S II
6	Tanah Sawah Irigasi	25.000	2001	Kreo Blok I				Pertanian		Rp 123.000.000,00	Ps. 33 lelang Garapan
7	Tanah Sawah Irigasi	12.202	2011	Pakintelan rt 1 rw 1		12/28/2007	HP 9	Lapangan Sepak Bola		Rp 762.200.000,00	Ps. 43/S I Bengkok Lurah
8	Tanah Sawah Irigasi	5.788	2011	MranggenRT.01/V		4/30/2007	HP. 15	Pertanian		Rp 35.000.000,00	P.5/Bondodeso
9	Tanah Sawah Irigasi	4.313	2011	Sikunir RT 03 RW 05		4/30/2007	HP. 17	Pertanian		Rp 8.100.000,00	Kel. Plalangan
10	Tanah Sawah Irigasi	8.504	2011	Kp. Rejosari		12/28/2007	HP. 16	Lapangan		Rp 167.500.000,00	- Lain-Lain
11	Tanah Sawah Irigasi	1.501	2011	Pakintelan rt 1 rw 3		4/30/2007	HP. 05	Pertanian		Rp 76.800.000,00	Ps. 40 S I
12	Tanah Sawah Irigasi	7.725	2011	Mranggen RT.02/V		4/30/2007	HP. 28	Pertanian		Rp 38.000.000,00	P.9/ Bengkok Modin
13	Tanah Sawah Irigasi	2.351	2011	Mranggen RT.01/V		4/30/2007	HP. 20	Pertanian		Rp 9.500.000,00	P.3/Bondo Deso
14	Tanah Sawah Irigasi	7.752	2011	pakintelan rt 1 rw 1		4/30/2007	HP. 01	Pertanian		Rp 340.800.000,00	Ps. 47 S II
15	Tanah Sawah Irigasi	2.783	2011	Jl. Tembus Kelurahan		8/30/2007	HP. 30	Kantor Kelurahan		Rp 150.000.000,00	
16	Tanah Sawah Irigasi	399	2011	Kp. Sumurjurang		4/30/2007	HP. 24	Pertanian		Rp 70.500.000,00	Kel. Sumurejo

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
17	Tanah Sawah Irigasi	5.987	2011	Bangkong		07/04/2007	HP. 20.	Pertanian		Rp 874.800.000,00	Ps.141 S III / Ex Bengkok Bekel
18	Tanah Sawah Irigasi	1.460	2011	RW V Karanganyar/seglinggang		2/18/2008	HP. 33	Lelang		Rp 35.000.000,00	P. 332/S III Bengkok Bayan III
19	Tanah Sawah Irigasi	5.556	2011	RW V Karanganyar/Seglinggang		2/18/2008	HP. 31	Lelang		Rp 100.750.000,00	P. 63/S II Kepentengan I
20	Tanah Sawah Irigasi	10.896	2011	RW V Karanganyar/seglinggang		2/18/2008	HP. 34	Lelang		Rp 200.150.000,00	P. 300/S III Bengkok Bayan II
21	Tanah Sawah Irigasi	6.125	2011	Karangsari RW VI		4/30/2007	HP. 28	Pertanian		Rp 160.000.000,00	P. 19/S Kel. Sumurejo
22	Tanah Sawah Irigasi	1.060	1981	Pongangan RT 03 RW 04				Pertanian		Rp 176.250.000,00	P. 48 / S II
23	Tanah Sawah Irigasi	3.193	2011	Pongangan RT 02 RW 03		06/07/2007	HP. 04	Leleng Tani		Rp 478.950.000,00	Ps. 33 S II
24	Tanah Sawah Irigasi	4.197	2007	Pengkol/RT.02/RW.01		4/30/2007	HP.07	Pertanian		Rp 30.000.000,00	P.78/Bengkok PTD SIII
25	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1.620	2011	Pongangan RT 03 RW 02		06/07/2007	HP. 12	Lapangan		Rp 243.000.000,00	Ps. 37 S II
26	Tanah Sawah Irigasi	9.411	2007	Kebon Manis		4/30/2007	HP.12	Pertanian		Rp 48.000.000,00	P.23/Bekas Bengkok Carik P 102
27	Tanah Sawah Irigasi	3.050	1981	Jl. Nongkosawit Utama RT 02 RW I		4/28/2016	HP 06	Pertanian		Rp 225.000.000,00	P 18 /S I Modin
28	Tanah Sawah Irigasi	5.551	2011	Siwagan /Karanggeneng RW II		4/30/2007	HP. 16	Pertanian		Rp 50.000.000,00	Ps. 62/S.III Bengkok Petengan
29	Tanah Sawah Irigasi	11.500	1981	RW VIII Dawung				Pertanian		Rp 110.500.000,00	Ps. 105/S BengkokBekel V Dawung

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
30	Tanah Sawah Irigasi	413	2011	RW II Magersari/Glagah		2/18/2008	HP 29	Sub Terminal		Rp 135.000.000,00	P. 52/S II Bengkok Modin II
31	Tanah Sawah Irigasi	9.350	2014	RT 1 RW 8 Sukorejo				Kebun Jati		Rp 448.800.000,00	persil 32 S II eks bengkok lurah
32	Tanah Sawah Irigasi	9.350	2014	RT 1 RW 8 Sukorejo				Kebun Jati		Rp 448.800.000,00	persil 32 S II eks bengkok lurah
33	Tanah Sawah Irigasi	1.091	2011	Sekaran		07/04/2007	HP.19	Lapangan		Rp 243.000.000,00	Ps. 176 S III /Ex Bengkok Lurah
34	Tanah Lapangan Sepak Bola	8.950	1981	RW X Siroto Bengkok Bekel IX				Lapangan Olahraga		Rp 135.000.000,00	P. 103/D Bengkok Bekel IX
35	Tanah Lapangan Sepak Bola	5.000	1993	Sikopyah Blok B NO. 44				Sarana Olah Raga		Rp 100.000.000,00	No. Persil P.35 SI Kel. Jatirejo
36	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.300	1976	Terwidi RT 02 RW 04				Lapangan Sepak Bola		Rp 810.000.000,00	Lapangan II Terwidi - APBD
37	Tanah Lapangan Sepak Bola	8.880	2011	Pongangan RT 02 RW 02		06/07/2007	HP. 13	Lapangan Olah Raga		Rp 1.212.000.000,00	Ps. 38 S I
38	Tanah Lapangan Sepak Bola	10.070	2011	Pongangan RT 03 RW 02		07/04/2007	HP. 15	Lapangan		Rp 1.050.000.000,00	Kel Pongangan
39	Tanah Sawah Irigasi	9.434	2011	Ds. Sileboh		4/30/2007	HP. 27	Pertanian		Rp 250.000.000,00	Ps. 17/SII Bengkok Carik
40	Tanah Sawah Irigasi	2.378	2011	Jalan Cepoko Raya RT 4 RW 1		8/30/2007	HP. 32	Kantor Kelurahan Cepoko		Rp 78.000.000,00	P. 120
41	Tanah Sawah Irigasi	1.262	27760	Kp. Patemon				Pusta Patemon		Rp 785.000.000,00	Ps. 9/SII
42	Tanah Sawah Irigasi	2.250	1945	Sumurgunung RW V				Rumah Dinas		Rp 60.000.000,00	P. 32 Sijembangan
43	Tanah Sawah Irigasi	12.517	1981	Jl. Jedung RT 01 RW III Kel. Nongkosawit		4/28/2016	HP 19	Lapangan OR/pertanian		Rp 160.000.000,00	P 165 / S IV Bekel
44	Tanah Sawah Irigasi	550	2011	Kp. Rejosari Jalan Semboja		7/26/2007	HP. 08	Pertanian		Rp 467.500.000,00	Ps. 8/SII
45	Tanah Sawah Irigasi	11.143	2011	Sumurjurang		4/30/2007	HP. 08	Pertanian		Rp 160.000.000,00	Ps. 8b / S II Bengkok Lurah
46	Tanah Sawah Irigasi	7.142	2011	Sikunir RT 03 RW 05		4/30/2007	HP. 19	Pertanian		Rp 206.550.000,00	B.Bayan III/301

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
47	Tanah Sawah Irigasi	1.803	2011	Bangkong		07/04/2007	HP. 21	Pertanian		Rp 643.950.000,00	Ps. 170 S III / Ex Bengkok Modin
48	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	400	1993	RT.02 RW. 03 SikopyahBlok B 8				Rumah Dinas		Rp 120.000.000,00	P.35/SI
49	Tanah Sawah Irigasi	2.020	1945	Karanggeneng RW I				Pertanian		Rp 50.000.000,00	P. 100b/S Kel. Sumurejo
50	Tanah Sawah Irigasi	11.677	2011	Karanggeneng Si Wuni		4/30/2007	HP. 5	Pertanian		Rp 270.000.000,00	Ps. 56 /S II Bengkok Carik
51	Tanah Sawah Irigasi	3.893	2011	Bekel I /Marakana		7/31/2007	HP. 23	Lelang		Rp 45.000.000,00	P 64/Bekel I Sikuncen
52	Tanah Sawah Irigasi	4.739	2011	RW V Karanganyar/Seglinggang		2/18/2008	HP. 32	JSDF		Rp 100.120.000,00	P. 60/S II Kepentengan I
53	Tanah Sawah Irigasi	171	2011	Pakintelan rt 1 rw 6		4/30/2007	HP. 03	Pertanian		Rp 16.800.000,00	Pakintelan
54	Tanah Sawah Irigasi	5.114	2011	Cepoko Rt. 07 Rw 01		4/30/2007	HP. 21	Pertanian		Rp 80.000.000,00	P. 16
55	Tanah Sawah Irigasi	9.900	1945	Dampyak RW IV				Pertanian		Rp 240.000.000,00	P. 144 Kel. Sumurejo
56	Tanah Sawah Irigasi	1.579	2011	Pengkol RT.01/I		4/30/2007	HP. 21	Pertanian		Rp 25.000.000,00	P.79 . PTD
57	Tanah Usaha	3.347	2011	Tinjomoyo RT 1 RW 8		7/31/2007	HP 15	Pertanian		Rp 20.000.000,00	Ps. 11 S II Ex Bengkok Carik
58	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	5.140	2011	jl. Wonosari - nongkosawit RT. 3 RW. 5		8/24/2007	HP. 37	Pertanian		Rp 100.980.000,00	Kp.Plalangan Lor
59	Tanah Usaha	150	1981	Kandri RT 5 RW 01				Pertanian		Rp 60.600.000,00	Kandri
60	Tanah Usaha	1.385	2011	Jl. Kandri Raya Utara RT 06 RW 01		06/07/2007	HP. 08	Pertanian		Rp 260.550.000,00	Ps. 41 /S II Bengkok Bekel
61	Tanah Usaha	13.100	1945	Sumurgunung RT.01 RW.05, Sumurrejo				Tanah Sawah		Rp 314.400.001,00	
62	Tanah Sawah Irigasi	2.498	2011	Kp. Patemon		7/26/2007	HP. 14	Pertanian		Rp 192.200.000,00	Ps. 61/SII

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
63	Tanah Tegalan	1.100	2011	Kp. Mbubak RT. 03 RW.02				Tanah Kosong		Rp 28.000.000,00	Kelurahan Kalisegoro
64	Tanah Sawah Irigasi	2.079	2011	Pakintelan rt 2 rw 4		4/30/2007	HP. 08	Pertanian		Rp 115.200.000,00	Ps. 32 S I Ex Bengkok Carik
65	Tanah Sawah Irigasi	1.705	1945	RT 04/IV				Makam Umum		Rp 200.000.000,00	Kel. Sumurejo
66	Tanah Sawah Irigasi	1.363	2011	RW II Magersari/sikrangkeng		2/18/2008	HP. 35	Balai Kelurahan		Rp 45.000.000,00	P. 91 /S Bondo Deso
67	Tanah Sawah Irigasi	1.057	1981	Glagah				Sawah		Rp 70.000.000,00	P. 49/ Bekel Glahah
68	Tanah Sawah Irigasi	5.775	2011	Kp. Krajan RT 1 RW 5 Patemon		7/26/2007	HP. 10	Pertanian		Rp 369.450.000,00	P. 136/SII
69	Tanah Sawah Irigasi	12.071	2011	Ds. Sikrocokan		4/30/2007	HP.06	Pertanian		Rp 160.000.000,00	P. 131a/ Sikrocokan
70	Tanah Sawah Irigasi	4.700	1993	Sirayu Blok 8 No. 44 RT 02 RW.03				JSDF		Rp 496.000.000,00	P.14/SII Kel. Jatirejo
71	Tanah Sawah Irigasi	8.214	2011	Mangunsari RT.04/4		4/30/2007	HP. 36	Pertanian		Rp 40.000.000,00	Ps.56/Bengkok Bekel
72	Tanah Sawah Irigasi	4.161	2011	Kebon Manis/RT.03/3		4/30/2007	HP. 17	Pertanian		Rp 13.000.000,00	P.33/Bengkok Bayan
73	Tanah Sawah Irigasi	1.068	2011	Plalangan sikunir RT 03 RW 05		4/30/2007	HP 11	Pertanian		Rp 76.960.000,00	Kp. Plalangan Lor
74	Tanah Sawah Irigasi	8.400	1945	Bandardowo RW VII				Pertanian		Rp 2.041.200.000,00	P.81 / SIII Kel. Sekaran
75	Tanah Sawah Irigasi	3.126	2011	Plalangan Wonosari RT 2 RW 2		4/30/2007	HP. 13	Pertanian		Rp 216.000.000,00	Kepetengan/P.4
76	Tanah Pertanian lainnya	2.396	2020	Jl Dk Ngijo RT.01 RW.02 Kel Ngijo		12/30/2020	HP.00010	Pertanian		Rp 239.600.001,00	Percil 134 Klass SII
77	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.957	2014	Graha Sartika RT 13 RW 5 Sukorejo		12/23/2014		Tanah Jaringan Jalan		Rp 93.936.000,00	Fasum Fasos
78	Tanah Tegalan	3.916	2011	Pakintelan		4/30/2007	HP. 04	Pertanian		Rp 192.000.000,00	Ps. 43 S I Ex Bengkok Lurah
79	Tanah Lapangan Sepak Bola	8.773	1976	Marakana				Lapangan Sepak Bola		Rp 160.060.000,00	HP.58

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
80	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	320	1976	jl. durian v RT. 04 RW.01 Plalangan				Pertanian		Rp 306.000.000,00	Persil 79/SIII
81	Tanah Tegalan	3.874	2011	bengkok sibrujul		4/30/2007	HP. 21	Pertanian		Rp 200.000.000,00	Ps. 103a /S III
82	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.557	2011	Kandri RT 2 RW I		06/07/2007	HP. 05	Rumah Dinas		Rp 567.600.000,00	Bengkok Bayan
83	Tanah Sawah Irigasi	28.778	1976	RW III Kliwonan				Lelang		Rp 1.170.120.000,00	Hasil Penilaian Tahun 2009
84	Tanah Sawah Irigasi	17.300	1976	RW III Kliwonan		7/26/2007	HP. 15	Lelang		Rp 51.900.000,00	Ps. 139/S I Tanah Desa
85	Tanah Sawah Irigasi	8.313	2011	RW VII Ngrembel		7/26/2007	HP. 12	JSDF		Rp 145.000.000,00	P. 35/S Bengkok Bekel II
86	Tanah Sawah Irigasi	10.983	2011	Kwasen		06/07/2007	HP. 08	Lelang Tani		Rp 1.647.450.000,00	Ps. 68 S I
87	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	481	2011	Jl.Kandri Utara I RT 05 RW 01		06/07/2007	HP. 04	Kantor Kelurahan		Rp 22.500.000,00	Ps. 44 /S II Bengkok Kamituwo
88	Tanah Sawah Irigasi	2.008	2011	Jalan Rimba Bhakti RT 4 RW 1 Rejosari		7/26/2007	HP. 06	Pertanian		Rp 550.000.000,00	P. 39/SII
89	Tanah Sawah Irigasi	4.737	2011	Pakintelan		4/30/2007	HP. 07	Pertanian		Rp 192.000.000,00	Kel. Pakintelan
90	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	250	2007	Mranggen		4/30/2007	HP. 05	Kantor Kelurahan Mangunsari		Rp 10.000.000,00	Kel. Mangunsari
91	Tanah Sawah Irigasi	12.400	1981	RW VII Bantardowo				Pertanian		Rp 3.013.200.000,00	P.136 / SIII Kel. Sekaran
92	Tanah Sawah Irigasi	3.238	2011	Sikunir RT 03 RW 05		7/31/2007	HP. 35	Pertanian		Rp 144.000.000,00	B.Carik/77
93	Tanah Sawah Irigasi	4.379	2011	RT 4 RW I Cepoko		4/30/2007	HP. 27	Pertanian		Rp 112.500.000,00	P. 82
94	Tanah Sawah Irigasi	4.358	2011	Pongangan RT 02 RW 02		06/07/2007	HP. 11	Pertanian		Rp 653.700.000,00	Ps. 34 S II
95	Tanah Sawah Irigasi	15.000	1945	Sumurgunung RW V				JSDF		Rp 450.000.000,00	P. 30/S Kel. Sumurejo
96	Tanah Sawah Irigasi	7.727	2011	Kp. Rejosari		7/26/2007	HP. 11	Pertanian		Rp 122.600.000,00	Ps. 17/SII
97	Tanah Sawah Irigasi	4.658	2011	Siwatu		4/30/2007	HP. 03	Pertanian		Rp 230.000.000,00	Ps. 122 /S II Bengkok Lurah

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
98	Tanah Sawah Irigasi	11.442	2011	Jl Kyai Sabrang RT 04 RW 03		4/30/2007	HP. 24	Pertanian		Rp 2.085.000.000,00	Kel. Plalangan
99	Tanah Sawah Irigasi	11.650	1981	Jl. Randusari RT 01 RW II				JSDF		Rp 644.000.000,00	P .68 / S II
100	Tanah Sawah Irigasi	3.060	2011	RW VII Ngrembel		7/26/2007	HP. 10	Lelang		Rp 60.000.000,00	P. 36/S II Kepentengan III
101	Tanah Sawah Irigasi	5.971	2011	Kwasen		06/07/2007	HP. 07	Pertanian		Rp 895.650.000,00	Ps. 69 S I
102	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1.868	2010	Dk.Bangkong RT.01/RW.07 Kel.Sekaran		07/04/2007	HP 22	Pertanian		Rp 38.400.000,00	Kel.Sekaran
103	Tanah Sawah Irigasi	13.601	2011	Kebon Manis RT.01/3		7/31/2007	HP. 39	Pertanian		Rp 42.000.000,00	Ps.95/Bengkok Bekel
104	Tanah Sawah Irigasi	2.600	1981	Jl. Jedung RT 01 RW III				Lapangan		Rp 112.500.000,00	P .163 / S III
105	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	300	1993	Sikopyah Blok B 8 RT.02 RW. 03				Masjid		Rp 80.000.000,00	P.35/SI
106	Tanah Sawah Irigasi	33.350	1945	Karanggeneng RW I				Pertanian		Rp 500.000.000,00	P. 114/S Kel. Sumurejo
107	Tanah Sawah Irigasi	6.920	2011	Kp. Rejosari		7/26/2007	HP. 04	Pertanian		Rp 124.900.000,00	Ps. 74/SII
108	Tanah Usaha	3.309	2011	Jl. Kandri Raya Utara RT 06 RW 01		06/07/2007	HP. 10	Pertanian		Rp 241.200.000,00	Ps. 40 /S II Bengkok Modin
109	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	236	2011	Jl. Mr Wuryanto RT 04 RW 01		4/30/2007	HP. 18	Koramil/TK		Rp 121.500.000,00	B.Carik . Koramil/TK
110	Tanah Lapangan Sepak Bola	9.250	1981	Ngijo				Lapangan Sepak bola		Rp 5.973.000.000,00	Kel Ngijo
111	Tanah Lapangan Sepak Bola	505	2011	Kandri RT 02 RW 01		06/07/2007	HP. 03	Lapangan		Rp 60.000.000,00	Bengkok Modin
112	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.034	2011	Kalialang Lama II RT 4 RW 01		5/18/2006	HP. 06	Kantor Kelurahan		Rp 75.000.000,00	Kel. Sukorejo
113	Tanah Sawah Irigasi	7.389	2011	Kp. Muntal		7/26/2007	HP. 07	Pertanian		Rp 288.750.000,00	Ps. 66/SII

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
114	Tanah Sawah Irigasi	6.000	1981	Jl. Jedung RT 01 RW III K				Lelang/sawah		Rp 240.000.000,00	P. 167/S II Bengkok Bayan
115	Tanah Pertanian lainnya	13.068	2020	Jl Sumurgunung RT.03 RW.05		12/30/2020	HP.00039	Pertanian		Rp 673.002.001,00	Bengkok Sijembangan Percil 61 KLass SIII
116	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.000	1981	JL. Kol. RW. Sugiarto, RT 04 RW 02				Ex Balai Kelurahan		Rp 65.000.000,00	Kel. Sadeng - Lain-Lain
117	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.150	2011	Terwidi RT 02 RW 04				Pertanian		Rp 31.050.000,00	P.71/S II Bengkok Bayan III
118	Tanah Sawah Irigasi	3.490	1993	Cepoko				Pertanian		Rp 174.500.000,00	P. 59 Bengkok Bayan
119	Tanah Sawah Irigasi	326	2011	RW VII Glagah		2/18/2008	HP. 28	Lelang		Rp 12.000.000,00	P 337/Modin II
120	Tanah Usaha	12.050	1981	Pongangan RT 03 RW 02				Pertanian		Rp 1.917.000.000,00	Ps. 75
121	Tanah Sawah Irigasi	11.000	1945	Kp. Patemon Muntal RT 02 RW 05				Lapangan		Rp 135.000.000,00	P. 70/SII
122	Tanah Sawah Irigasi	6.750	1981	Sinombok RW III rt 1 rw 1				Pertanian		Rp 324.000.000,00	
123	Tanah Sawah Irigasi	8.508	2011	Sukorame Rt 04 rw. 01		4/30/2007	HP. 19	Pertanian		Rp 337.500.000,00	P. 123
124	Tanah Sawah Irigasi	200	1981	Pakintelan rt 2 rw 3				Pertanian		Rp 20.600.000,00	Ps. 56/S I Bengkok Lurah
125	Tanah Sawah Irigasi	11.600	1945	Karanggeneng RW II				Pertanian		Rp 300.000.000,00	P. 107/S
126	Tanah Sawah Irigasi	9.182	2011	RW VI Watusari		7/26/2007	HP. 13	Pertanian		Rp 386.350.000,00	Ps. 63/SI
127	Tanah Sawah Irigasi	4.738	2011	Srigrogolan /Sumurjurang RW III		4/30/2007	HP. 10	JSDF		Rp 95.000.000,00	Ps. 70/ Bengkok Bayan
128	Tanah Sawah Irigasi	5.043	2011	Kp. Rejosari		7/26/2007	HP. 02	Pertanian		Rp 100.400.000,00	Ps. 134/SII
129	Tanah Sawah Irigasi	3.844	2011	Jl. Rimba Bhakti RT 4 RW 1 Rejosari		7/26/2007	HP. 03	Pertanian		Rp 150.000.000,00	Ps. 31/SI

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
130	Tanah Sawah Irigasi	7.229	2011	Sumurjurang Dungsapi		4/30/2007	HP. 26	Pertanian		Rp 165.000.000,00	Ps. 65a/SII Bengkok Bayan
131	Tanah Sawah Irigasi	5.637	2011	Sumurjurang		4/30/2007	HP. 20	Pertanian		Rp 320.000.000,00	Ps. 8a /S II Bengkok Lurah
132	Tanah Sawah Irigasi	2.157	27760	Pakintelan rt1 rw 6		4/30/2007	HP. 02	Ex Kantor		Rp 226.600.000,00	Ps. 43/S I Bengkok Lurah
133	Tanah Sawah Irigasi	706	2011	Cepoko Rt. 04 Rw. 01		4/30/2007	HP. 28	Pertanian		Rp 780.000.000,00	P. 68 Kel. Cepoko
134	Tanah Sawah Irigasi	2.386	2011	Getas Rt. o6 Rw 1		4/30/2007	HP. 22	Pertanian		Rp 165.000.000,00	P. 2
135	Tanah Sawah Irigasi	9.667	2011	Terwidi RT 02 RW 04		4/30/2007	HP.25	Pertanian		Rp 1.200.000.000,00	B. Lurah./P.67
136	Tanah Sawah Irigasi	2.858	2011	Tinjomoyo RT 1 RW 8		7/31/2007	HP. 14	Pertanian		Rp 40.000.000,00	Ps. 4 S II Ex BengkokCarik
137	Tanah Sawah Irigasi	1.293	1981	Jl. Getas RT 03 RW V Kel. Nongkosawit		4/28/2016	HP 21	Sawah		Rp 75.000.000,00	P. 98/S III Bengkok Bekel
138	Tanah Lapangan Bola Volly	300	1976	Jl. Plalangan Raya RT 4 RW 1				Lapangan Volly		Rp 217.000.000,00	Balai Kel. - APBD
139	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	409	2014	Mangunsari Asri RT 4 RW 7 Gunungpati		12/23/2014		Tanah Sarana Peribadatan		Rp 19.632.000,00	Fasum Fasos
140	Tanah Sawah Irigasi	2.902	2011	Banaran RW 4 ,Kali Kidul		07/04/2007	HP. 23	Pertanian		Rp 923.400.000,00	Ps. 45/S III Kel. Sekaran
141	Tanah Sawah Irigasi	15.650	2011	jetis trawas RT 3 RW 3		4/30/2007	HP. 18	Pertanian		Rp 448.500.000,00	P. 121
142	Tanah Sawah Irigasi	1.200	1993	Kp. Kandri RT 06 RW 01				Pertanian		Rp 165.450.000,00	
143	Tanah Sawah Irigasi	10.494	2011	Pongangan RT 02 RW 02		06/07/2007	HP. 05	Lelang Tani		Rp 1.574.100.000,00	Ps. 48 S II
144	Tanah Sawah Irigasi	13.246	2011	Cepoko Rt. 04 Rw. 01		4/30/2007	HP. 26	Pertanian		Rp 1.425.550.000,00	P. 83a
145	Tanah Sawah Irigasi	4.243	2011	Wonosari RT 02 RW 02 Sebelah Lapangan Sigotro		4/30/2007	HP. 26	Pertanian		Rp 110.000.000,00	B.Carik/41

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
146	Tanah Sawah Irigasi	3.200	1981	Sileboh RW II rt 1 rw 2				Pemukiman Warga		Rp 153.600.000,00	
147	Tanah Sawah Irigasi	3.990	2011	Pengkol RT 03 RW 03		4/30/2007	HP. 14	Pertanian		Rp 25.000.000,00	P.63 Bengkok Kepetengan
148	Tanah Sawah Irigasi	12.450	2014	Si Tuk Karangsari				Pertanian		Rp 796.800.000,00	Ps 5
149	Tanah Sawah Irigasi	6.001	2011	RW IX Pandean/Siketur		2/18/2008	HP. 37	Lelang		Rp 105.000.000,00	P. 137/SIII Kepentengan III
150	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.124	2011	Pongangan RT 03 RW 02		4/30/2007	HP. 03	Balai Kelurahan		Rp 168.600.000,00	Ps.45
151	Tanah Bangunan Kandang Hewan	9.601	2011	Kp. Setinggen RT 02 RW 04 Terwidi		4/30/2007	HP. 27	Peternakan		Rp 336.000.000,00	B.Lurah/98
152	Tanah Sawah Irigasi	5.200	1981	Modin IV				JSDF		Rp 76.000.000,00	P.309/S Bengkok Bekel IX
153	Tanah Sawah Irigasi	7.300	1981	Sumurgunung RW V				Pertanian		Rp 150.000.000,00	P. 62/S Kel. Sumurejo
154	Tanah Sawah Irigasi	1.677	2011	Jl. Nongkosawit Utama RT 02 RW I		4/30/2007	HP. 03	Balai Kelurahan, Kantor Kel.		Rp 50.000.000,00	Ps. 19/S I
155	Tanah Sawah Irigasi	5.973	2011	Sumurjurang Sipucung		4/30/2007	HP. 14	Pertanian JSDF		Rp 250.000.000,00	Ps. 60 /S IV Bengkok Bayan
156	Tanah Sawah Irigasi	16.982	2011	Pengkol RT.02/I		4/30/2007	HP. 32	Pertanian		Rp 120.000.000,00	Ps..69/ Bengkok Carik
157	Tanah Sawah Irigasi	10.300	1993	Sikopyah Blok B 8				JSDF		Rp 540.000.000,00	P. 35/SI Kel. Jatirejo
158	Tanah Sawah Irigasi	4.840	2011	Ngijo mendak		06/07/2007	HP. 06	Pertanian		Rp 327.000.000,00	P. 102/S II Bengkok Modin
159	Tanah Sawah Irigasi	12.470	2011	Pakintelan rt 1 rw 1		4/30/2007	HP. 06	Pertanian		Rp 532.800.000,00	Ps. 43 S I
160	Tanah Sawah Irigasi	7.250	1981	Salaan RT 03/V				Pertanian		Rp 19.500.000,00	P.24/ Bengkok Bekel
161	Tanah Sawah Irigasi	6.412	2011	Sumurjurang lapangan karanggeneng		4/30/2007	HP. 22	Pertanian		Rp 200.000.000,00	Ps.81 / DII
162	Tanah Sawah Irigasi	12.381	2011	Terwidi RT 2 RW 4		4/30/2007	HP.16	Pertanian		Rp 177.000.000,00	B.Lurah/75

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
163	Tanah Sawah Irigasi	12.943	2011	Wonosari RT 02 RW 02		4/30/2007	HP. 22	Pertanian		Rp 250.000.000,00	Bekel /III
164	Tanah Sawah Irigasi	5.380	2011	Terwidi RT 02 RW 04		4/30/2007	HP. 29	Pertanian		Rp 96.039.000,00	Bayan P.73
165	Tanah Sawah Irigasi	7.062	2011	Terwidi RT 02 RW 04		4/30/2007	HP. 23	Pertanian		Rp 131.600.000,00	Modin/45
166	Tanah Sawah Irigasi	4.000	2014	Dungsapi Sumur Jurang				Pertanian		Rp 256.000.000,00	Ps 65 b
167	Tanah Sawah Irigasi	6.588	2011	Karanggeneng RW II		4/30/2007	HP. 09	Pertanian		Rp 140.000.000,00	Ps. 144/SII Bengkok Lurah
168	Tanah Sawah Irigasi	6.200	1981	Pakintelan rt 1 rw 1				Pertanian		Rp 297.600.000,00	P. 47/S II Kel Pakintelan
169	Tanah Sawah Irigasi	9.250	1981	Banaran				Lapangan Sepak Bola		Rp 2.247.750.000,00	P.60 / SII Kel. Sekaran
170	Tanah Sawah Irigasi	14.413	2011	Sukorame Rt. 04 Rw. 03		06/08/2007	HP.30	Pertanian		Rp 282.000.000,00	P. 143
171	Tanah Sawah Irigasi	6.576	2011	Pengkol RT.03/01		4/30/2007	HP. 16	Pertanian		Rp 18.000.000,00	P.62/Modin
172	Tanah Tegalan	1.787	2011	Kp. Ampel Gading RW 4		06/07/2007	HP. 06	Pertanian		Rp 423.082.500,00	Ps. 7 / S II Bengkok Modin
173	Tanah Tegalan	4.484	2011	Kp. Delik Sari RT2 RW2		06/07/2007	HP. 01	Pertanian		Rp 232.417.500,00	Ps. 26 /S III Bengkok Modin
174	Tanah Tegalan	18.159	2011	Cepoko RT 04 RW 01		4/30/2007	HP. 23	Pertanian		Rp 1.092.000.000,00	P. 14
175	Tanah Tegalan	6.000	1963	Cepoko RT 1 RW 1				Pertanian		Rp 360.000.000,00	P. 18
176	Tanah Tegalan	2.067	2011	Mundingan RT 5 RW 2		4/30/2007	HP. 24	Pertanian		Rp 122.000.000,00	P. 184
177	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	396	2014	Graha Sartika RT 13 RW 5 Sukorejo Gunungpati		12/23/2014		Tanah Sarana Pertamanan		Rp 19.008.000,00	Fasum Fasos
178	Tanah Tegalan	3.161	2011	Kalisegoro Rw4		06/07/2007	HP. 05	Pertanian		Rp 203.205.000,00	Ps. 28 /S III Bengkok Bayan
179	Tanah Lapangan Sepak Bola	21.200	2020	Jl Sumurgunung RT.06 RW.05		12/30/2020	HP.00035	Lapangan Sepak Bola		Rp 1.091.800.001,00	Lapangan Amongrogo

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
180	Tanah Lapangan Terbang Olah Raga	10.465	1981	Jl. Nongkosawit Utama RT 02 RW I		4/28/2016	HP 9	Lapangan Olahraga		Rp 750.000.000,00	P. 9/S II
181	Tanah Lapangan Sepak Bola	8.858	2011	pongangan RT 03 RW 02		8/24/2007	HP. 18	Lapangan Sepak Bola		Rp 1.328.700.000,00	Kel Pongangan
182	Tanah Sawah Irigasi	3.050	1981	Bendosari RT 03 RW VIII				Dilelang		Rp 45.560.000,00	P. 26/S IV Ee Bengkok Bayan
183	Tanah Sawah Irigasi	450	1993	Kp. Kandri RT 06 RW 01				Pertanian		Rp 177.200.000,00	
184	Tanah Sawah Irigasi	3.939	2011	RT 3 RW III Cepoko		4/30/2007	HP. 16	Pertanian		Rp 117.000.000,00	P. 118
185	Tanah Sawah Irigasi	4.296	2011	Wonosari RT 02 RW 02		4/30/2007	HP. 21	Pertanian		Rp 167.000.000,00	Kel. Plalangan
186	Tanah Kering Lainnya	4.000	1993	Sikopyah Blok B 8 Raya Jatirejo				Kebun Gizi		Rp 6.000.000,00	P.35/SI
187	Tanah Kering Lainnya	13.230	1979	Kebon Manis RT 05 RW 03 Kel Mangunsari		4/30/2007	44	Tanah Kosong		Rp 132.300.000,00	
188	Tanah Sawah Irigasi	3.837	2011	PagersalamRT.01/2		7/31/2007	HP. 43	Pertanian		Rp 10.500.000,00	Ps.22/Bengkok Carik
189	Tanah Sawah Irigasi	4.086	2011	Mranggen RT.01/V		4/30/2007	HP. 19	Pertanian		Rp 30.000.000,00	P. 5. Bondodeso
190	Tanah Sawah Irigasi	19.673	2011	RT 1 RW 5 Kp. Rejosari Patemon		7/26/2007	HP. 12.	Pertanian		Rp 983.650.000,00	Ps. 139/SII
191	Tanah Sawah Irigasi	3.418	2011	Kp. Patemon Persil 102/ s II RT 01 RW 01		7/26/2007	HP. 05	Embung/Danau		Rp 170.900.000,00	Tempat sendiri - APBD
192	Tanah Sawah Irigasi	5.395	2011	Sigembungan /Karanggeneng RW I		4/30/2007	HP. 23	Pertanian		Rp 300.000.000,00	Ps. 5/SIII Bengkok Kamituwo
193	Tanah Sawah Irigasi	21.750	41709	Si Randu Karangsari				Pertanian		Rp 1.392.000.000,00	Ps 4
194	Tanah Sawah Irigasi	10.717	1981	Jl. Nongkosawit Raya RT 04 RW I		4/28/2016	HP 17	Pertanian		Rp 100.000.000,00	P18 / D IV bengkok Watu tumpuk
195	Tanah Sawah Irigasi	3.750	1963	Cepoko Rt. 04 Rw 01				Lapangan Sepak Bola		Rp 150.000.000,00	P. 106
196	Tanah Sawah Irigasi	4.100	2014	Siwaqan Karangeneng				pertanian (lelang)		Rp 262.400.000,00	Ps 89

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
197	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	6.150	2001	Jatirejo				SD I		Rp 206.000.000,00	Sirayu Blok 8 No 44
198	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	531	2011	Jl.Kandri Utara I RT 05 RW 01		4/30/2007	HP. 02	Kantor dan Balai		Rp 7.500.000,00	Kandri - Lain-Lain
199	Tanah Sawah Irigasi	2.795	2010	Jl.Ngijo Raya No.1/ RT 01 RW 02		8/30/2007	HP. 09	Kantor Kelurahan		Rp 476.800.000,00	Kel. Ngijo
200	Tanah Sawah Irigasi	15.390	2011	Pongangan RT 03 RW 03		06/07/2007	HP. 10	Pertanian		Rp 2.308.500.000,00	Ps.48 SI / Kel. Pongangan
201	Tanah Sawah Irigasi	1.538	2011	Plalangan sikunir RT 03 RW 05		4/30/2007	HP. 34	Pertanian		Rp 123.012.000,00	Bekel I/P.68
202	Tanah Sawah Irigasi	9.571	2011	Siklepu /Karanggeneng RW II		4/30/2007	HP. 7	Pertanian		Rp 600.000.000,00	Ps. 99/S.II Bengkok Bekel.
203	Tanah Sawah Irigasi	10.225	2011	Terwidi RT 04 RW 04		4/30/2007	HP. 30	Pertanian		Rp 174.150.000,00	Bekel/P.90
204	Tanah Sawah Irigasi	12.450	1945	Karangsari RW VI				Pertanian		Rp 265.000.000,00	P. 5/S Kel. Sumurejo
205	Tanah Sawah Irigasi	17.999	2011	Mranggen RT.01/V		4/30/2007	HP. 29	Pertanian		Rp 75.000.000,00	P.8./Bengkok Lurah
206	Tanah Sawah Irigasi	2.733	2011	Wonosari RT 002 RW 02		4/30/2007	HP. 14	Pertanian		Rp 50.400.000,00	Modin/P,66
207	Tanah Usaha	5.211	2011	Jl. Kandri RT 06 RW 01		06/07/2007	HP. 09	Pertanian		Rp 164.640.000,00	Ps. 42 /S II Bengkok Kepetengan
208	Tanah Pertanian lainnya	10.018	2020	Jl Dk Ngijo RT.4 RW.01 Kel Ngijo		12/30/2020	HP.00011	Pertanian		Rp 1.001.800.001,00	Percil 96 Klass II
209	Tanah Perkebunan Lainnya	20.000	2003	Kp. Talunkacang RT 05 RW 03				Obyek Wisata		Rp13.000.000.000,00	
210	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	143	2014	Mangunsari Asri RT 7 RW 4 Gunungpati		12/23/2014		Tanah Sarana Pertamanan		Rp 6.864.000,00	Fasum Fasos
211	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7.214	2014	Mangunsari Asri RT 7 RW 4 Gunungpati		12/23/2014		Tanah Jaringan Jalan		Rp 346.272.000,00	Fasum Fasos

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
212	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	80	2014	Mangunsari Asri RT 7 RW 4 Gunungpati		12/23/2014		Tanah Sarana Air Bersih		Rp 3.840.000,00	Fasum Fasos
213	Tanah Tegalan	1.330	2011	RT 05 RW 02 Kel. Sadeng		4/30/2007	HP. 04	Kantor Kelurahan		Rp 91.500.000,00	Ps.40a/D II Yasan Kel. Sadeng
214	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	169	2011	Kalialang Lama RT 4 RW 1		7/31/2007	HP.11	TK Pertiwi		Rp 150.000.000,00	Kel. Sukorejo
215	Tanah Tegalan	2.239	2011	Kalisegoro RW4		06/07/2007	HP. 03	Pertanian		Rp 123.880.000,00	Ps. 28 /S III Bengkok Bayan
216	Tanah Tegalan	5.573	2011	Kp. Delik Sari RW4		06/07/2007	HP. 04	Pertanian		Rp 269.467.500,00	Ps. 29 / S III Bengkok Kepetengan
217	Tanah Tegalan	3.947	2011	Kp. Delik Sari rt2 RW2		06/07/2007	HP. 09	Pertanian		Rp 203.300.000,00	Ps. 13 /S II Bengkok Bekel
218	Tanah Pertanian lainnya	3.014	2020	Jl Sumurgunung rt.06 rw.05		12/30/2020	HP.0038	Fasilitas Umum		Rp 155.221.001,00	Bengkok sijembangan Persil 32 Klass SII
219	Tanah Pertanian lainnya	2.446	2020	Jl Sumurejo, Kel Sumurejo Kec Gunungpati		12/30/2020	HP.00037	Kebun PKK		Rp 125.969.001,00	Bengkok sijembangan Percil 32 KLass SII
220	Tanah Sawah Irigasi	6.250	1981	Jl. Randusari RT 04 RW II				JSDF		Rp 307.500.000,00	P. 73/S II Bengkok Modin
221	Tanah Sawah Irigasi	3.034	2011	RW V Karanganyar		7/26/2007	HP. 09	Lelang		Rp 28.850.000,00	P. 61/SII Bengkok Modin I
222	Tanah Sawah Irigasi	5.189	1981	RW I Jagalan/Sipule				Pertanian		Rp 10.150.000,00	P 299/Bondo deso
223	Tanah Sawah Irigasi	10.918	2011	RW II Magersari		7/26/2007	HP. 14	Pertanian		Rp 360.600.000,00	Ps. 99/ SII Bengkok Carik
224	Tanah Sawah Irigasi	742	2011	Pengkol RT /02/I		4/30/2007	HP. 33	Pertanian		Rp 20.000.000,00	Ps.68/Bengkok Bekel
225	Tanah Sawah Irigasi	1.600	1981	Jl. Jedung RT 01 RW III				Lapangan OR		Rp 640.000.000,00	P. 161/S II Bengkok Bayan

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
226	Tanah Sawah Irigasi	1.471	2000	Jl. Nongkosawit Raya RT 03 RW I		4/30/2007	HP 5	SD Nongkosawit		Rp 227.500.000,00	P.20 / S.II Kel.Sawit
227	Tanah Sawah Irigasi	1.704	2011	Pagersalam		7/31/2007	HP. 40	Pertanian		Rp 20.000.000,00	Ps. 32 S II Ex Bengkok Bondo Deso
228	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.140	2011	Pongangan RT 03 RW 02		4/30/2007	HP. 14	Kantor Kelurahan		Rp 180.000.000,00	Kel Pongangan
229	Tanah Sawah Irigasi	50	1981	Pengkol RT 01/I				Pertanian		Rp 45.000.000,00	P.122/Bengkok PTD
230	Tanah Sawah Irigasi	13.765	2011	Mangunsari RT.06/4		4/30/2007	HP. 34	Pertanian		Rp 57.000.000,00	Ps.35.Bengkok Bekel
231	Tanah Sawah Irigasi	14.000	1981	RW III Sekaran				Kantor Kelurahan		Rp 2.247.750.000,00	P. 81 / SI Kel. Sekaran
232	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.200	1981	Sileboh RW II rt 001 rw 002				Kantor Kelurahan		Rp 153.600.000,00	
233	Tanah Sawah Irigasi	8.417	2011	Gunungpati		2/18/2008	HP. 39	Pertanian		Rp 45.000.000,00	PS. 254/ Bengkok Carik
234	Tanah Sawah Irigasi	3.210	1981	Pakintelan RT 1 RW 2				Kantor Kelurahan		Rp 148.800.000,00	Ps. 37 Bengkok Kel. Pakintelan
235	Tanah Sawah Irigasi	12.300	1963	RW III Cepoko				Pertanian		Rp 369.000.000,00	P. 113
236	Tanah Sawah Irigasi	2.557	2011	Pagersalam RT01/2		4/30/2007	HP. 25	Pertanian		Rp 10.000.000,00	P.23/ Bengkok Carik
237	Tanah Sawah Irigasi	12.500	1963	RW I Cepoko				Lapangan Sepak Bola		Rp 500.000.000,00	P. 105
238	Tanah Sawah Irigasi	19.306	2011	RT 4 RW I Cepoko		06/08/2007	HP. 31	Pertanian		Rp 1.187.500.000,00	Ps. 83b
239	Tanah Sawah Irigasi	12.071	41954	Si Krocoan Karanggeneng				siringin,minapolitan		Rp 772.544.000,00	Ps 131 b
240	Tanah Sawah Irigasi	3.630	2011	Ngijo		06/07/2007	HP. 04	Pertanian		Rp 14.000.000,00	Ps. 102 S II / Ex Bengkok Modin
241	Tanah Sawah Irigasi	12.145	2011	Sukorame Rt. 04 Rw 03		4/30/2007	HP. 25	Pertanian		Rp 735.000.000,00	P. 142
242	Tanah Sawah Irigasi	2.366	1981	Jl. Jedung RT 01 RW III		4/28/2016	HP 12	Lelang		Rp 168.000.000,00	P. 166/S III Bengkok Carik
243	Tanah Sawah Irigasi	1.951	2000	Sikrakalan RT 03/I				Pertanian		Rp 30.000.000,00	
244	Tanah Sawah Irigasi	5.470	2011	Jongkong RT 1 RW 6		4/30/2007	HP. 28	Pertanian		Rp 101.250.000,00	Bekel./P.76

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
245	Tanah Sawah Irigasi	6.850	2011	Pakintelan rt 1 rw 3				Dikuasai Warga		Rp 276.000.000,00	Ps. 42 Kel. Pakintelan
246	Tanah Sawah Irigasi	4.172	2011	Pongangan RT 03 RW 02		06/07/2007	HP. 06	Lelang Tani		Rp 625.800.000,00	Ps. 76 S III
247	Tanah Sawah Irigasi	4.538	2011	Jongkong RT 2 RW 6 blok 13.133		4/30/2007	HP. 31	Pertanian		Rp 96.850.000,00	Bekel/P.74
248	Tanah Sawah Irigasi	17.001	2011	jetis Rt. 02 Rw 03		4/30/2007	HP. 17	Pertanian		Rp 321.000.000,00	P. 110
249	Tanah Sawah Irigasi	11.727	2011	Sumurjurang RW V		4/30/2007	HP. 13	Pertanian		Rp 135.000.000,00	Ps. 27 / S III Bengkok Lurah
250	Tanah Sawah Irigasi	600	1981	Jl. Jedung RT 01 RW III				Sawah		Rp 50.000.000,00	P. 160/S II Bengkok Modin
251	Tanah Sawah Irigasi	1.614	1993	Jl. R. w. Sugiyarto RT 04 RW 02				Sawah		Rp 193.680.000,00	
252	Tanah Sawah Irigasi	3.245	2011	Jl. Koesoeryono Gang Semboja		8/30/2007	HP. 15	Kantor Kel		Rp 346.000.000,00	Ps. 38/SII
253	Tanah Sawah Irigasi	2.452	2011	Kp. Patemon RT 2 RW 1		7/26/2007	HP. 09	Pertanian		Rp 252.000.000,00	Ps. 133/SII
254	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2.114	2011	RT 02 RW III				Rumah Dinas Lurah		Rp 317.100.000,00	
255	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	652	2011	Pongangan RT 03 RW 02		06/07/2007	HP. 09	Rumah Dinas Lurah		Rp 8.400.000,00	Ps. 45
256	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	574	2011	Jl. Plalangan RT 4 RW 1		4/30/2007	HP. 20	Kantor Kelurahan Plalangan		Rp 235.100.000,00	Kel. Plalangan
257	Tanah Lapangan Sepak Bola	6.437	2011	Jl Mr Wuryanto RT 02 RW 02 Plalangan		8/24/2007	HP. 36	Lapangan Sepak Bola		Rp 121.500.000,00	P.12
258	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	587	2011	Kalialang Lama RT 4 RW 1		7/31/2007	HP. 12	Kamtor Kelurahan		Rp 40.000.000,00	Ps. 14 S II Ex Bengkok Lurah

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
259	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2.488	2011	Pongangan RT 03 RW 02		8/24/2007	HP. 16	Rumah Dinas		Rp 373.200.000,00	Kel Pongangan
260	Tanah Sawah Irigasi	413	1981	RW II Magersari/Glagah				sub.terminal		Rp 135.000.000,00	P. 51/S Bengkok Modin
261	Tanah Sawah Irigasi	2.832	2011	RW VII Ngrembel/Glagah		7/31/2007	HP. 22	Sawah		Rp 54.000.000,00	P. 47/SII Bondo Deso Glagah - Lain-Lain
262	Tanah Sawah Irigasi	5.900	1993	Sirayu Blok 8 No. 44				JSDF		Rp 110.000.000,00	P.34/SII Kel. Jatirejo
263	Tanah Sawah Irigasi	8.600	2014	- ,Kel. Mangunsari,Kec. Gunungpati				pertanian (lelang)		Rp 412.800.000,00	Bk.Bayan P.23 S.I
264	Tanah Sawah Irigasi	9.912	1945	RT 01/V				Makam Umum		Rp 100.000.000,00	Kel. Sumurejo
265	Tanah Sawah Irigasi	3.385	1981	Jl. Jedung RT 01 RW III		4/28/2016	HP 20	Lelang		Rp 865.000.000,00	P. 168/S IV Bengkok Modin
266	Tanah Sawah Irigasi	1.380	1981	RW VI Malon				Lelang		Rp 13.000.000,00	P. 178/S Tanah Gantungan Malon
267	Tanah Sawah Irigasi	18.200	1981	RW II Magersari				JSDF		Rp 540.600.000,00	P. 141. Bengkok Lurah
268	Tanah Sawah Irigasi	1.055	2011	RW II Sikrangkeng		7/26/2007	HP. 13	JSDF		Rp 91.000.000,00	Ps. 141/S Bengkok Lurah
269	Tanah Sawah Irigasi	11.005	2011	Jalan Kalisegoro Raya RT 4 RW 1		8/24/2007	HP. 13	Lapangan Olah Raga		Rp 285.000.000,00	Ps. 51/S I Ex Bengkok Lurah
270	Tanah Sawah Irigasi	3.400	1981	Jl. Jedung RT 01 RW III				Lapangan Olahraga		Rp 152.000.000,00	P. 164/S I Kel. Nongkosawit
271	Tanah Sawah Irigasi	10.957	2011	Kebon Manis/RT.03/3		4/30/2007	HP. 18	Pertanian		Rp 345.000.000,00	P.29/Bengkok Lurah
272	Tanah Sawah Irigasi	1.376	2011	Pagersalam/RT.01/II		4/30/2007	HP. 08	Pertanian		Rp 18.000.000,00	P.23 / BengkokCarik
273	Tanah Sawah Irigasi	8.400	1963	Jwtis trawas Rt. 03 Rw. 03				Pertanian		Rp 252.000.000,00	P. 119
274	Tanah Usaha	5.450	41954	RT 04 RW 01				Pertanian		Rp 261.600.000,00	Ps 96/SII

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
275	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	250	1993	Jatirejo Blok VII No. 108				Kantor Kelurahan dan Balai		Rp 8.000.000,00	
276	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	27.100	2020	Jl Wuryanto km.05 Kel Sumurrejo		12/30/2020	HP.00040	Kantor Kecamatan		Rp 3.292.650.001,00	Bengkok sijembangan Percil 32 Klass SII
277	Tanah Sawah Irigasi	24.800	1945	Karangsari RW VI				Pertanian		Rp 500.000.000,00	P. 56/S Kel. Sumurejo
278	Tanah Sawah Irigasi	3.200	1981	Ngijo				Lapangan Voly		Rp 308.000.000,00	Kel.Ngijo
279	Tanah Sawah Irigasi	12.909	2011	Kp. Trawas Rt. 02 Rw 03		4/30/2007	HP. 29	Lapangan		Rp 504.000.000,00	Ps.114 S II
280	Tanah Sawah Irigasi	5.723	2011	Jetis Trawas RT 03 RW 03		4/30/2007	HP.15	Pertanian		Rp 240.000.000,00	P. 116
281	Tanah Sawah Irigasi	1.283	2007	Desel RT 02/II				Sawah		Rp 37.995.000,00	- - APBD
282	Tanah Usaha	1.175	1981	Pongangan RT 01 RW 04				Pertanian		Rp 176.250.000,00	Ps. 47
283	Tanah Sawah Irigasi	10.093	2011	Pengkol RT.02/I		7/31/2007	HP. 42	Pertanian		Rp 345.000.000,00	Ps.72/Bengkok Lurah
284	Tanah Sawah Irigasi	950	1963	Cepoko RT 4 RW 1				Lapangan Sepak Bola		Rp 28.500.000,00	P. 94
285	Tanah Sawah Irigasi	3.200	1981	Pakintelan				Lapangan Volly		Rp 124.800.000,00	Ps. 37/S II Bengkok Bayan Kel. Pakintelan
286	Tanah Sawah Irigasi	10.079	2011	Ngijo		06/07/2007	HP. 05	Pertanian		Rp 924.000.000,00	Ps. 78 S I / Ex Bengkok Bayan
287	Tanah Sawah Irigasi	4.350	1963	Jetis Trawas Rt. 03 RW 03				Pertanian		Rp 130.500.000,00	P. 117
288	Tanah Sawah Irigasi	5.193	2011	Cepoko RT 5 RW 1		4/30/2007	HP. 20	Pertanian		Rp 192.000.000,00	P. 12
289	Tanah Sawah Irigasi	6.070	2011	Karanggeneng RW I Siwuni		4/30/2007	HP. 12	Pertanian		Rp 140.000.000,00	Ps. 109 / Bengkok Lurah
290	Tanah Lapangan Bola Volly	2.350	1981	Modin				Lapangan		Rp 13.500.000,00	P.59
291	Tanah Tegalan	1.125	2011	Kp. Sedayu RT 1 RW 2		4/30/2007	HP. 07	Kantor Kelurahan		Rp 146.205.000,00	Bengkok Bondo Desa

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
292	Tanah Sawah Irigasi	13.072	27771	Mangunsari RT 03/4		4/30/2007	HP. 09	Pertanian		Rp 45.000.000,00	P.31/ Bengkok Lurah
293	Tanah Sawah Irigasi	7.593	2011	Sumurjurang		4/30/2007	HP. 15	Pertanian JSDF		Rp 330.000.000,00	Ps. 61 /S IV Bengkok Bayan
294	Tanah Persil Lainnya	768	1981	Kp Jagalan RT.06/ RW.01				Koramil 0733 BS		Rp 1.087.488.000,00	Tanah Koramil
295	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	278	2014	Mangunsari Asri RT 7 RW 4		12/23/2014		Tanah TPS		Rp 13.344.000,00	Fasum Fasos
296	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	87	2014	Graha Sartika RT 13 RW 5 Sukorejo		12/23/2014		Tanah Sarana Peribadatan		Rp 4.176.000,00	Fasum Fasos

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

Tabel 2.4
Gedung dan Bangunan Kecamatan Gunungpati

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat		kel plalangan, nongkosawit, pakintelan			Pembelian	115147705
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat		kel sadeng, pongangan			Pembelian	87245666
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat		kel nongkosawait, pongangan, sekaran			Pembelian	127796978
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat		kel sadeng, mangunsari, ngijo, plalangan, sumurejo			Pembelian	185031724
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat		kel kalisegoro			Pembelian	58311259
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat		mangunsari, kalisegoro, tugu plalangan, sumurejo			Pembelian	163645946
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat		kel sadeng			Pembelian	18784290
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat		kel nongkosawit, sadeng, pongangan, sekaran, ngijo			Pembelian	163488432
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik		Bendosari RT 3 RW 8			Pembelian	306007750
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik		Taman Jatisari RT 2 RW 5 Pongangan			Pembelian	165445703
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik		Jl. Mr Wurryanto Km 5 - Kantor Kecamatan Gunungpati			Pembelian	151790000
Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Baik	36	Pengkol Mangunsari RT 6 RW 1	36		Hibah	208393341
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	580	Jl. Mr.Wuryanto Km. 5 Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati	580		Hibah	516388000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Mangunsari RT 01 RW V	200		PEMBELIAN	62097677
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Kol. RW. Sugiarto RT 4 RW 2 Sadeng	200		PEMBELIAN	65000000

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	132	Sekaran RT 01 RW III	132		PEMBELIAN	212035282
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	360	Sekaran RT 01 RW III	360		PEMBELIAN	263663722
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	640	Plalangan RT 004 RW I	640		PEMBELIAN	198350000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	300	Patemon RT 2 RW 1	300		PEMBELIAN	199590865
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	69	Kalialang Lama II RT 4 RW 1 Sukorejo	69		PEMBELIAN	717983975
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Pongangan RT 3 RW 2	120		PEMBELIAN	77941831
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	300	Kaum RT 1 RW 4 Sumurrejo	300		PEMBELIAN	65000000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	900	Kaum RT 1 RW 4 Sumurrejo	900		PEMBELIAN	229217000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	90	Jl. Mundingan RT 1 RW 1 Jatirejo	90		PEMBELIAN	146591000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Mundingan RT 1 RW 1 Jatirejo	120		PEMBELIAN	60000000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	96	Jl. Ngijo Raya No. 1 RT 01 RW II	96		PEMBELIAN	373804646
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Ngijo Raya No. 1 RT 1 RW 2	200		PEMBELIAN	241948669
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	36	Jl. Ngijo Raya No. 1 RT 1 RW 2	36		PEMBELIAN	30000000

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	112	Jl. Raya Pongangan RT 3 RW 2	112		PEMBELIAN	381854545
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	72	Nongkosawit RT 02 RW 1	72		PEMBELIAN	150000000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	80	Nongkosawit RT 02 RW I	80		PEMBELIAN	437576189
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	688	Jl. Mr. Wurryanto KM 5 Gunungpati	688		PEMBELIAN	1213540900
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	199	Jl. Mr. Wuryanto KM. 5 Kel. Sumurrejo, Kec. Gunungpati	199		PEMBELIAN	1799575000
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	550	Jl. Mr Wuryanto Km. 5 Gunungpati	550		PEMBELIAN	2056934150
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	72	Nongkosawit RT 2 RW 1	72		PEMBELIAN	119037798
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	190	Cepoko Raya RT 4 RW 1	190		PEMBELIAN	19845782
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	300	Kaum RT 1 RW 4 Kelurahan Sumurrejo	300		PEMBELIAN	34609229
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	132	Sekaran RT 01/III	132		PEMBELIAN	39166892
Pagar Permanen	Baik	2250	Jl. Mr Wurryanto KM 5 Sumurrejo Gunungpati	2250		PEMBELIAN	105105000
Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik	162	Kelurahan Patemon RT 2 RW 1	162		PEMBELIAN	96410000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Kurang Baik	400	Lapangan Amongrogo RW 5 Kelurahan Sumurrejo	400		PEMBELIAN	99410000
Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	430	Jalan Mr. Wurryanto Km. 5 Gunungpati	430		PEMBELIAN	61954989
Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	40	JL. Mr Wuryanto Km.5 Kantor Kecamatan Gunungpati	40		PEMBELIAN	29920000
Gedung Garasi/Pool Permanen	Kurang Baik	126	Jl. Kandri Utara II RT 6 RW 1	126		PEMBELIAN	34640870
Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	25	Jl. Mr. Wurryanto Km 5 Kecamatan Gunungpati	25		PEMBELIAN	15500000

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	60	Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1	60		PEMBELIAN	84712000
Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Kurang Baik	12	Plalangan RT 04 RW I	12		PEMBELIAN	5000000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	220	Jl.Mendak RT.05/Rw.02 Kel. Ngijo Kec. Gunungpati	220		Pembelian	74994000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	220	Jl.Pengkol Raya Rt.03/Rw.1 Kel. Mangunsari Kec. Gunungpati	220		Pembelian	79988000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	336	Jl.Widengsari Timur Rt.01/Rw.1 Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	336		Pembelian	74900000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	190	Jl. Nongko Sawit Utama RT 2 RW 1 Kecamatan Gunungpati, Semarang	190		Pembelian	150000000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	190	Jl. Sedayu Raya RT. 06/RW.I Kelurahan Kalisegoro Kec. GunungPati SEMARANG	190		Pembelian	99700000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	220	Jl. Raya Cepoko RT 4 RW 1	220		Pembelian	84400000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	190	Plalangan RT 4 RW 1	190		Pembelian	258952189
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	190	Ngijo RT 2 RW 2	190		Pembelian	267445599
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	190	Sirayu RT 1 RW 2 Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati	190		Pembelian	104307000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	100	Jl. Randusari RT 3 RW 2	100		Pembelian	96847500
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	420	Jl. Kalisegoro RT 3 RW 2	420		PEMBELIAN	111230085
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	200	Jl. Cepoko Raya RT 4 RW 1	200		PEMBELIAN	24807227
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	640	Plalangan RT 004 RW I	640		PEMBELIAN	34589837
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	300	Patemon RT 2 RW 1	300		PEMBELIAN	34699047
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Baik	330	Pongangan	330		PEMBELIAN	307500000

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Baik	64	Margersari RT 02 RW 02 Gunungpati	64		PEMBELIAN	75000000
Tugu Pembangunan	Baik	400	Kandri RT 01/ I	400		PEMBELIAN	20631663
Tugu Peringatan Lainnya	Baik	3	Sekaran RT 01 RW III	3		PEMBELIAN	2500000
Tugu Peringatan Lainnya	Baik	1.5	Plalangan RT 04 RW I	1.5		PEMBELIAN	2000000
Tugu Peringatan Lainnya	Baik	1.5	Plalangan RT 4 RW 1	1.5		PEMBELIAN	2000000
Tugu Peringatan Lainnya	Baik	1.5	Jongkong RT 02 RW VI	1.5		PEMBELIAN	2000000
Tugu Peringatan Lainnya	Baik	1.5	Sabrangan RT 1 RW III	1.5		PEMBELIAN	2000000
tugu lainnya (dst)	Baik	400	Jl. Pongangan RT 3 RW 2	400		PEMBELIAN	20644337
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	77	Sekaran RT 01 RW III	77		PEMBELIAN	45815000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	60	Pakintelan RT 02 RW II	60		PEMBELIAN	60000000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	54	Nongkosawit RT 02 RW I	54		PEMBELIAN	150000000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	60	Kalisegoro RT 3 RW 2	60		PEMBELIAN	75000000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	120	Jl. Cepoko Raya RT 4 RW 1	120		PEMBELIAN	210000000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	126	Jl. Kandri RT 2 RW 1	126		PEMBELIAN	126000000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	300	RT 6 RW 5 Sumurgunung	300		PEMBELIAN	89479801
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	6.7	Plalangan RT 04 RW I	6.7		PEMBELIAN	45000000

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	300	Mangunsari RT 01 RW V	300		PEMBELIAN	54479801
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	132	Patemon RT 2 RW I	132		PEMBELIAN	75000000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	60	Jatirejo RT 2 RW 3	60		PEMBELIAN	197099000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	264	Sadeng RT 05 RW II	264		PEMBELIAN	45000000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	36	Jl. Ngijo Raya No. 1 RT 1 RW 2	36		PEMBELIAN	75000000
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Baik	45	Kalialang Lama RT 4 RW 1	45		PEMBELIAN	222001000
Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	Baik	200	Jl. Raya Ngijo No. 1 RT 1 RW 2	200		PEMBELIAN	24863259
Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	Kurang Baik	300	Jalan Raya Sadeng RT 5 RW 2	300		PEMBELIAN	34609901
Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	Kurang Baik	112	Jl. Raya Pongangan RT 3 RW 2	112		PEMBELIAN	19845782
Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	Kurang Baik	50	Ngabean RT 1 RW 4 Gunungpati	50		PEMBELIAN	25000000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	450	Mangunsari RT 01 RW V	450		PEMBELIAN	272904482
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Kalisegoro RT 3 RW 2 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati	120		PEMBELIAN	284281493
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	157	Plalangan RT 04 RW I	157		PEMBELIAN	472733177

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	210	Patemon RT 2 RW I	210		PEMBELIAN	415499122
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	240	Pakintelan RT 01 RW II	240		PEMBELIAN	118920000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	140	Pakintelan RT 02 RW II	140		PEMBELIAN	97309500
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	190	Cepoko Raya RT 4 RW 1	190		PEMBELIAN	731923689
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Cepoko Raya RT 4 RW 1	200		PEMBELIAN	329508689
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Kandri Utara II RT 6 RW 1	200		PEMBELIAN	345285079
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	126	Jl. Kandri Utara II RT 6 RW 1	126		PEMBELIAN	313848000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Kandri Utara II RT 6 RW 1	120		PEMBELIAN	40000000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	48	Plalangan RT 04 RW I	48		PEMBELIAN	35000000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	443	Magersari RT 2 RW 2 Kelurahan Gunungpati	443		PEMBELIAN	299013514
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	98	Magersari RT 2 RW 2 Kelurahan Gunungpati	98		PEMBELIAN	252489000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	128.65	Kantor Kel.Mangunsari RT 1 RW 5	128.65		PEMBELIAN	100288683
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	313	Balai Kel. Pongangan RT 3 RW 2	313		PEMBELIAN	193157023

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	130.3	Balai Kel. Gunungpati Magersari RT 2 RW 2	130.3		PEMBELIAN	145158960
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	66.56	Kaum RT 1 RW 4 Kel.Sumurrejo	66.56		PEMBELIAN	22867856
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	227.7	Jl. Kalisegoro RT 3 RW 2 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati	227.7		PEMBELIAN	101642835
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	220	Kantor Kel. Pakintelan RT 1 RW 2	220		PEMBELIAN	101632654
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	300	Kelurahan Pongangan RT 3 RW 2	300		PEMBELIAN	318273172
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Baik	950	Kalialang Lama II RT 4 RW 1 Sukorejo	950		PEMBELIAN	256037976
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Baik	536	Sadeng RT 05 RW II	536		PEMBELIAN	159427492
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Baik	447	Sadeng RT 05 RW II	447		PEMBELIAN	84488646
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Baik	54	Sabrangan RT 04 RW III	54		PEMBELIAN	25000000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	45	Gapuro/Taman Cepoko Rt.01 Rw.01 Kel.Cepoko	45		Pembelian	36158967
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik		Jl. Bonglang Cepoko rt 5 rw 2			Pembelian	97750000
Pagar Permanen	Baik		Jl. Cepoko Raya I RT 04 RW 01 Cepoko			Pembelian	149880000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	72	Cepoko RT 4 RW 1	72		Pembelian	107047000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	900	Lapangan Morokono Rt 03 Rw 05	900		Pembelian	342104487
Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	Baik	150	Balai Makam Kp.Malon Rt 01 Rw.06	150		Pembelian	31295384

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	50	Gapuro Kp.Sekalongan Rt.04 Rw.05 Kel.Gunungpati	50		Pembelian	24098322
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	50	Gapuro Kp.Ngrembel Rt.01 Rw.07 Kel.Gunungpati	50		Pembelian	50204687
Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	Baik		Kp. Magersari RT 02 RW 02 Kel. Gunungpati			Pembelian	140500000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	55	Balai RT 04 RW 04 Kelurahan Gunungpati	55		Pembelian	72396000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	55	Gapuro Jatirejo Rt.05 Rw.01 Kel.Jatirejo	55		Pembelian	28769883
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	20	Tugu Kokolaka Rt.03 Rw.01 Kel.Jatirejo	20		Pembelian	36028837
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		RT 02 RW 03 Kelurahan jatirejo			Pembelian	166623000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	50	Gapuro Sekargading Rt.01 Rw.03 Kel.Kalisegoro	50		Pembelian	58921000
Pagar Permanen	Baik	94.9	Kantor Kelurahan Kalisegoro	94.9		Pembelian	196447985
Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik		Lapangan Gelora Bumi Mintarsih Jl. Raya Kalisegoro			Pembelian	148860000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik		Jl. Kalisegoro Raya No. 24 RT 2 RW 2			Pembelian	152138000
Pagar Permanen	Baik	0	RW 03 Kalisegoro	0		Pembelian	70755000
Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	Tidak Diketemukan	50	Gapuro Kp.Talunkacang Rt.05 Rw.03 Kel.Kandri	50		Pembelian	49079230
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	250	Gedung PKK Kel.Kandri Rt.05 Rw.01 Kandri Utara	250		Pembelian	74576000
Pagar Permanen	Baik	55	Kandri Pesona Asri Kel.Kandri	55		Pembelian	49182000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	120	Kandri Selatan IV RT 2 RW 1 Kel.Kandri (lapangan sepak bola)	120		Pembelian	151009000
Taman lainnya	Baik		Jl. Siwarak Raya RT 04 RW 02 kandri			Pembelian	149170000
Pagar Permanen	Baik		Jl. Kandri Utara II RT 06 RW 01 Kelurahan Kandri			Pembelian	151790000
Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	72	Jl. Kandri Selatan IV RT 02 RW 01	72		Pembelian	184658879

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Baik	486	Lapangan Mranggen Rt 01 Rw 05	486		Pembelian	139453000
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	250	Gedung PKK Kelurahan Mangunsari ,Mrangen Rt.01 Rw.05 Kel.Mangunsari	250		Pembelian	97125000
Pagar Permanen	Baik	300	Mangunsari RT 1 RW 5 Kel.Mangunsari (Pagar kantor Kel.Mangunsari)	300		Pembelian	299200000
Bangunan Posyandu	Baik		Jalan Gunung Turun 2 RT 4 RW 4 Kelurahan Mangunsari			Pembelian	159885000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	209.32	Sekretariat FKK Mranggen RT 01 RW 05 Kelurahan Mangunsari	209.32		Pembelian	85331000
Pagar Permanen	Baik		Jl. Ngijo Raya No. 1 RT 1 RW 2			Pembelian	148490000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik		Jl. Ngijo Raya No. 1 RT 1 RW 2			Pembelian	152288000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	9024	Jl. Bibis RT 1 RW 2 Ngijo	9024		Pembelian	160557051
Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	20	Jl. Ngijo Raya No 1 RT 1 RW 2	20		Pembelian	81903762
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik		Jl. Nongkosawit Utama RT 02 Rw 01 Nongkosawit			Pembelian	297610000
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	Baik		Jl. Nongkosawit Raya RT 04 RW I Kel. Nongkosawit Kec. Gunungpati			Pembelian	141428000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	20	Gapuro/Taman Winongsari Timur I Kel.Pakintelan RT 2 RW 2	20		Pembelian	39670484
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	224.34	Pakintelan rt 1 rw 2	224.34		Pembelian	258550000
Pagar Permanen	Baik		Kantor Kelurahan Pakintelan Jl. Winongsari RT 01 RW 02			Pembelian	154576000
Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Baik	48.28	Jl. Watusari Raya RT 01 RW 06 Kel. Pakintelan	48.28		Pembelian	62911000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	285	Lapangan Bola Voli Kelurahan Pakintelan	285		Pembelian	169212968
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	50	Gapuro /Taman/Tugu Rt.01 Rw.01 Patemon	50		Pembelian	14018713

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	120	Mutal RT 2 RW 5 Kel.Patemon (Lapangan Sepak Bola)	120		Pembelian	150200000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	692	Lapangan Voli Patemon	692		Pembelian	567134493
Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	20	Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati	20		Pembelian	81680526
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	50	Gapuro Jongkong Rt.02 Rw 06 Kel.Plalangan	50		Pembelian	26684991
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	350	Balai Rw Sabrangan Rt.04 Rw.03 Kel.Plalangan	350		Pembelian	47908676
Pagar Permanen	Baik		RT 04 RW 01 Kelurahan Plalangan			Pembelian	152279000
Taman lainnya	Baik		Kuwasenrejo RT 05, RT 06, RT 05 / RW 04 Pongangan			Pembelian	149090000
Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik		RT 01 RW 01 Kelurahan Pongangan			Pembelian	151264000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	96	Jatisari RT 2 RW 5 Pongangan	96		Pembelian	144850000
Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	Baik	50	Gapuro Gisiksari Rt 04 Rw 04 Kel.Sadeng	50		Pembelian	29709887
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	Baik		Jl. Kol RW Sugiarto (Area Taman Sadeng) Depan RS Permatasari RT 04 RW 04 Sadeng			Pembelian	150240000
Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	12	Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati	12		Pembelian	64092584
Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	12	Waduk Jatibarang Kelurahan Kandri Gunungpati	12		Pembelian	67629679
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	169	Lapangan Banaran Sekaran	169		Pembelian	963636719
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	224.34	Jl. Rambutan RT.01 / RW.03 Sekaran	224.34		Pembelian	163412500
Pagar Permanen	Baik		gang Rambutan RT 01 RW 03 Sekaran			Pembelian	150350000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	100	Lapangan Sukorejo Rt.01 Rw.12 Kel.Sukorejo	100		Pembelian	39674000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	50	Gapuro Perbatasan Damyak Rt.04 Rw.04 Kel.Sumurejo	50		Pembelian	30065165
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	50	Gapuro Karangsari Rt.03 Rw.06 Kel.Sumurejo	50		Pembelian	42108835

Nama Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Lokasi	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	90	Pos PAUD Karanggeneng Rt.01 Rw.02 Kel.Sumurejo	90		Pembelian	17859695
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	120	Pos PAUD Sumurgunung Rt.06 Rw.05 Kel.Sumurejo	120		Pembelian	43299305
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	60	Lapangan Volley Karanggeneng Rt.02 Rw.02 Kel.Sumurejo	60		Pembelian	19289000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	144	Jalan Tembus Balai Kelurahan SUmmurejo	144		Pembelian	163412500
Bangunan Posyandu	Baik		RT 03 RW 03 Kelurahan Sumurrejo			Pembelian	238134000
Pagar Permanen	Baik		RT 01 RW 04 Kelurahan Sumurrejo			Pembelian	152275000

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

1.5.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpati

Kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati mencakup capaian kinerja, anggaran dan realisasi pendanaan, kemitraan perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, berbagai inovasi pelayanan, serta penghargaan yang diperoleh selama 2021-2025.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Gunungpati

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Gunungpati, berdasarkan bidang urusan, diklasifikasikan ke dalam capaian kinerja urusan penunjang kewilayahan. Rincian capaian tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpati
Kota Semarang Tahun 2021- 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun							Realisasi Capaian pada Tahun							Rasio Capaian Pada Tahun						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (SMT 2)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (SMT 2)	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TUJUAN DAN SASARAN																							
I	Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Tahun 2016-2021																						
1	Tujuan 1 : Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, dan melayani																						
	Indikator Tujuan 1 :																						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gunungpati	Angka Indeks	85	87	-	-	-	-	-	95,81	86,55	-	-	-	-	-	112,72	99,48	-	-	-	-	-
a	Sasaran 1 : Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD																						
	Indikator Sasaran 1 :																						
	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
2	Tujuan 2 : Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang memberdayakan masyarakat																						
	Indikator Tujuan 2 :																						
	Tingkat partisipasi Masyarakat	Persen	81,95	83,17						81,95	83,17						100	100					
a	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan																						
	Indikator Sasaran 2 :																						
	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat	Persen	23,07	23,39	-	-	-	-	-	22,36	23,97	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun							Realisasi Capaian pada Tahun							Rasio Capaian Pada Tahun						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (SMT 2)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (SMT 2)	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	di Kecamatan dan Kelurahan																						
II	Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Tahun 2021-2026																						
1	Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi																						
	Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati	Angka			88,00	88,50	89,00	89,50	90,50			93,23	94,98	94,62	94,74	-			105,94%	107,32%	106,31%	105,85%	-
a	Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik																						
	Indikator Sasaran 1 :																						
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	-
b	Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan																						
	Indikator Sasaran 2 :																						
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	-	-	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	-	-	-	103,09%	102,04%	101,01%	50,00%	-
	Sasaran 3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan																						
c	Indikator Sasaran 3 :																						
	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	-	83,36%	85,04%	86,40%	88,40%	90,08%	-	-	83,36%	85,04%	86,72%	44,20%	-	-	-	100,00%	100,00%	100,37%	50,00%	-
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	-	-	90,00%	92,00%	95,00%	98,00%	100,00%	-	-	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-			100,00%	108,70%	105,26%	0%	-
d	Sasaran 4 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah																						
	Indikator Kinerja Sasaran 4 :																						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai	-	-	71,78	73,00	73,50	74,00	75,00	-	-	78,51	78,75	78,95	78,35	-	-	-	109,38%	107,88%	107,41%	105,88%	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah							Realisasi Capaian							Rasio Capaian						
			Pada Tahun							pada Tahun							Pada Tahun						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (SMT 2)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (SMT 2)	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungpati																						
	Jumlah Pendapatan pada Kecamatan Gunungpati	Rupiah	-	-	-	-	2.200.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	16.545.000,00	2.275.000,00	-	-	-	-	-	752,05%	37,92%	-

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Gunungpati

Pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Gunungpati memerlukan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Dukungan anggaran untuk tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Tahun 2022–2025 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
KECAMATAN GUNUNGPATI	24.310.331.000	50.782.897.106	47.819.204.372	55.384.116.097	59.780.885.846	77.092.648.583	-	23.606.810.879	47.245.869.161	47.085.092.617	53.641.529.273	56.931.302.273	20.343.149.587	-	97,11	93,04	98,46	96,85	95,23	26,39	-	31,16	11,12
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.171.415.795	-	-	-	-	-	-	9.857.766.360	-	-	-	-	-	-	96,92	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	69.668.345	-	-	-	-	-	-	68.203.225	-	-	-	-	-	-	97,90	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.298.800	-	-	-	-	-	-	30.956.000	-	-	-	-	-	-	95,84	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	16.682.000	-	-	-	-	-	-	14.634.300	-	-	-	-	-	-	87,73	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.461.750	-	-	-	-	-	-	2.461.750	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman	209.760.000	-	-	-	-	-	-	192.640.500	-	-	-	-	-	-	91,84	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	47.000.000	-	-	-	-	-	-	46.947.800	-	-	-	-	-	-	99,89	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	75.025.000	-	-	-	-	-	-	64.500.000	-	-	-	-	-	-	85,97	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Sukorejo	1.360.382.500	-	-	-	-	-	-	1.357.987.899	-	-	-	-	-	-	99,82	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Sadeng	873.675.000	-	-	-	-	-	-	862.762.380	-	-	-	-	-	-	98,75	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Kandri	517.094.000	-	-	-	-	-	-	493.441.255	-	-	-	-	-	-	95,43	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Operasional Kelurahan Sekaran	632.697.000	-	-	-	-	-	-	629.741.819	-	-	-	-	-	-	99,53	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Pongangan	591.484.000	-	-	-	-	-	-	543.394.874	-	-	-	-	-	-	91,87	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Kalisegoro	484.220.000	-	-	-	-	-	-	480.175.197	-	-	-	-	-	-	99,16	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Jatirejo	327.215.000	-	-	-	-	-	-	278.145.612	-	-	-	-	-	-	85,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Ngijo	495.544.900	-	-	-	-	-	-	453.551.007	-	-	-	-	-	-	91,53	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Patemon	566.270.000	-	-	-	-	-	-	565.170.485	-	-	-	-	-	-	99,81	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Nongkosawit	515.227.500	-	-	-	-	-	-	485.970.556	-	-	-	-	-	-	94,32	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Cepoko	393.762.500	-	-	-	-	-	-	372.044.000	-	-	-	-	-	-	94,48	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Gunungpati	840.287.500	-	-	-	-	-	-	823.617.587	-	-	-	-	-	-	98,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Mangunsari	519.742.500	-	-	-	-	-	-	519.270.610	-	-	-	-	-	-	99,91	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Pakintelan	543.615.000	-	-	-	-	-	-	533.785.726	-	-	-	-	-	-	98,19	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Plalangan	463.515.000	-	-	-	-	-	-	461.676.180	-	-	-	-	-	-	99,60	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Operasional Kelurahan Sumurrejo	593.787.500	-	-	-	-	-	-	576.687.598	-	-	-	-	-	-	97,12	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.019.520.405	-	-	-	-	-	-	965.746.144	-	-	-	-	-	-	94,73	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	46.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	3,23	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	60.000.000	-	-	-	-	-	-	59.440.000	-	-	-	-	-	-	99,07	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	600.247.500	-	-	-	-	-	-	599.035.000	-	-	-	-	-	-	99,80	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	91.527.905	-	-	-	-	-	-	87.052.744	-	-	-	-	-	-	95,11	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedungkantor	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	23.995.000	-	-	-	-	-	-	22.809.000	-	-	-	-	-	-	95,06	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	188.000.000	-	-	-	-	-	-	187.880.000	-	-	-	-	-	-	99,94	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	8.250.000	-	-	-	-	-	-	8.029.400	-	-	-	-	-	-	97,33	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	226.690.000	-	-	-	-	-	-	222.610.000	-	-	-	-	-	-	98,20	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu	226.690.000	-	-	-	-	-	-	222.610.000	-	-	-	-	-	-	98,20	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	707.615.000	-	-	-	-	-	-	705.901.150	-	-	-	-	-	-	99,76	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	707.565.000	-	-	-	-	-	-	705.901.150	-	-	-	-	-	-	99,76	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA	192.390.000	-	-	-	-	-	-	192.390.000	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
KETERTIBAN DAN KEAMANAN																							
Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum	192.390.000	-	-	-	-	-	-	192.390.000	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	10.500.000	-	-	-	-	-	-	8.900.000	-	-	-	-	-	-	84,76	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	8.900.000	-	-	-	-	-	-	89,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	11.311.639.800	-	-	-	-	-	-	11.011.017.225	-	-	-	-	-	-	97,34	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	37.661.000	-	-	-	-	-	-	37.051.000	-	-	-	-	-	-	98,38	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	19.023.300	-	-	-	-	-	-	19.023.300	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	1.217.220.000	-	-	-	-	-	-	1.216.995.000	-	-	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	1.209.935.000	-	-	-	-	-	-	1.152.732.000	-	-	-	-	-	-	95,27	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	3.136.840.500	-	-	-	-	-	-	3.077.850.000	-	-	-	-	-	-	98,12	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	42.960.000	-	-	-	-	-	-	15.780.425	-	-	-	-	-	-	36,73	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukorejo	353.000.000	-	-	-	-	-	-	350.338.000	-	-	-	-	-	-	99,25	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadeng	353.000.000	-	-	-	-	-	-	350.755.000	-	-	-	-	-	-	99,36	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandri	353.000.000	-	-	-	-	-	-	327.220.000	-	-	-	-	-	-	92,70	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekaran	353.000.000	-	-	-	-	-	-	351.948.800	-	-	-	-	-	-	99,70	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pongangan	353.000.000	-	-	-	-	-	-	351.030.000	-	-	-	-	-	-	99,44	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalisegoro	353.000.000	-	-	-	-	-	-	350.423.000	-	-	-	-	-	-	99,27	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirejo	353.000.000	-	-	-	-	-	-	349.939.450	-	-	-	-	-	-	99,13	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngijo	353.000.000	-	-	-	-	-	-	346.729.000	-	-	-	-	-	-	98,22	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patemon	353.000.000	-	-	-	-	-	-	351.428.900	-	-	-	-	-	-	99,55	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nongkosawit	353.000.000	-	-	-	-	-	-	349.300.000	-	-	-	-	-	-	98,95	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cepoko	353.000.000	-	-	-	-	-	-	261.420.000	-	-	-	-	-	-	74,06	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungpati	353.000.000	-	-	-	-	-	-	350.760.000	-	-	-	-	-	-	99,37	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunsari	353.000.000	-	-	-	-	-	-	349.218.900	-	-	-	-	-	-	98,93	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di	353.000.000	-	-	-	-	-	-	350.805.550	-	-	-	-	-	-	99,38	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kelurahan Pakintelan																							
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plalangan	353.000.000	-	-	-	-	-	-	349.928.900	-	-	-	-	-	-	99,13	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurrejo	353.000.000	-	-	-	-	-	-	350.340.000	-	-	-	-	-	-	99,25	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	663.160.000	-	-	-	-	-	-	635.080.000	-	-	-	-	-	-	95,77	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan	21.800.000	-	-	-	-	-	-	5.800.000	-	-	-	-	-	-	26,61	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	641.360.000	-	-	-	-	-	-	629.280.000	-	-	-	-	-	-	98,12	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	7.400.000	-	-	-	-	-	-	7.400.000	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat	7.400.000	-	-	-	-	-	-	7.400.000	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	18.563.112.181	17.166.083.709	19.989.080.075	24.567.767.193	27.059.617.780	-	-	16.852.851.888	16.950.846.419	18.938.362.257	23.545.306.152	11.346.304.642	-	-	90,79	98,75	94,74	95,84	41,93	-	10,49	(3,79)

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.889.700	2.383.180	7.468.000	56.931.000	3.014.800	-	-	950.700	2.230.700	6.797.680	54.643.012	1.052.200	-	-	50,31	93,60	91,02	95,98	34,90	-	201,78	236,29
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	846.120	28.789.200	539.200	-	-	-	-	780.000	28.009.572	-	-	-	-	-	92,19	97,29	-	-	1.602,18	3.490,97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1.741.090	1.265.000	506.000	-	-	-	-	1.473.100	1.212.300	-	-	-	-	-	84,61	95,83	-	-	(43,67)	(17,70)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	2.014.090	1.490.000	596.000	-	-	-	-	1.776.100	1.312.800	-	-	-	-	-	88,18	88,11	-	-	(43,01)	(26,09)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	2.129.580	1.078.390	3.036.000	506.000	-	-	-	2.000.700	1.058.650	2.815.400	501.100	-	-	-	93,95	98,17	92,73	99,03	-	16,28	12,22
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1.234.390	894.000	298.000	-	-	-	-	1.192.800	866.700	-	-	-	-	-	96,63	96,95	-	-	(47,12)	(27,34)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1.889.700	-	300.320	172.400	224.800	-	-	950.700	-	284.420	164.400	223.500	-	-	50,31	-	94,71	95,36	99,42	-	(6,10)	(3,12)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	253.600	253.600	21.284.400	344.800	-	-	-	230.000	232.610	20.261.840	327.600	-	-	-	90,69	91,72	95,20	95,01	-	2.731,51	2.837,80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	15.936.161.106	15.541.363.822	18.485.715.348	21.228.660.800	23.961.208.711	-	-	14.462.869.939	15.416.326.063	17.603.091.403	20.390.841.897	11.143.992.236	-	-	90,76	99,20	95,23	96,05	46,51	-	11,04	(2,18)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	15.355.361.106	14.825.900.266	17.676.430.548	20.421.874.000	22.512.665.461	-	-	13.901.749.939	14.719.323.163	16.814.410.623	19.591.362.197	10.749.492.236	-	-	90,53	99,28	95,12	95,93	47,75	-	10,39	(2,13)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	580.800.000	715.200.000	808.680.000	806.000.000	1.448.206.050	-	-	561.120.000	696.740.000	788.120.000	798.710.000	394.500.000	-	-	96,61	97,42	97,46	99,10	27,24	-	28,89	(2,99)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	263.556	201.600	337.200	112.400	-	-	-	262.900	179.000	321.200	-	-	-	-	99,75	88,79	95,26	-	-	(7,64)	23,76

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	201.600	224.800	112.400	-	-	-	-	189.180	224.100	-	-	-	-	-	93,84	99,69	-	-	(19,25)	18,46
Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	201.600	224.800	112.400	-	-	-	-	192.600	224.400	-	-	-	-	-	95,54	99,82	-	-	(19,25)	16,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.284.170.535	585.285.073	698.102.949	1.842.790.463	1.040.692.527	-	-	1.130.136.040	534.375.505	628.368.569	1.724.037.336	42.321.250	-	-	88,01	91,30	90,01	93,56	4,07	-	21,32	10,42
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	10.029.350	16.000.000	20.000.000	15.759.370	22.288.812	-	-	8.738.000	15.913.000	19.341.000	15.023.750	796.650	-	-	87,12	99,46	96,71	95,33	3,57	-	26,19	(3,34)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	189.956.000	145.930.545	228.352.492	688.159.137	11.350.904	-	-	139.450.000	144.449.603	200.071.478	627.764.000	-	-	-	73,41	98,99	87,62	91,22	-	-	34,08	85,29
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	25.005.250	50.000.000	58.648.562	45.544.767	65.831.129	-	-	19.758.965	30.503.110	47.875.425	44.888.500	13.770.400	-	-	79,02	61,01	81,63	98,56	20,92	-	34,86	8,94
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	25.068.100	19.736.833	19.561.308	17.585.219	5.164.244	-	-	6.893.750	12.365.200	11.602.060	10.785.500	1.911.000	-	-	27,50	62,65	59,31	61,33	37,00	-	(25,72)	(4,03)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	35.778.000	57.735.000	8.925.000	12.000.000	19.350.000	-	-	25.117.500	46.530.950	8.583.600	11.544.300	6.713.200	-	-	70,20	80,59	96,17	96,20	34,69	-	18,13	(0,91)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	7.600.000	39.083.000	74.967.000	104.772.000	85.373.000	-	-	2.160.000	29.213.642	71.240.006	77.681.286	9.130.000	-	-	28,42	74,75	95,03	74,14	10,69	-	131,83	329,28
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	990.733.835	256.799.695	287.648.587	958.969.970	831.334.438	-	-	928.017.825	255.400.000	269.655.000	936.350.000	10.000.000	-	-	93,67	99,45	93,74	97,64	1,20	-	39,50	20,35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-	317.419.885	127.625.658	117.208.680	383.553.509	-	-	-	317.049.195	126.245.000	110.160.000	-	-	-	-	99,88	98,92	93,99	-	-	53,09	(36,46)

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pemerintah Daerah																							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	317.419.885	127.625.658	117.208.680	383.553.509	-	-	-	317.049.195	126.245.000	110.160.000	-	-	-	-	99,88	98,92	93,99	-	-	53,09	(36,46)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	72.113.200	147.531.749	134.359.350	217.230.250	279.972.325	-	-	66.030.818	127.346.438	112.577.295	180.864.198	70.444.933	-	-	91,57	86,32	83,79	83,26	25,16	-	46,55	20,22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	72.113.200	96.232.000	96.232.000	155.867.160	210.934.520	-	-	66.030.818	78.995.838	88.960.295	136.648.748	44.549.933	-	-	91,57	82,09	92,44	87,67	21,12	-	32,69	4,61
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	51.299.749	38.127.350	61.363.090	69.037.805	-	-	-	48.350.600	23.617.000	44.215.450	25.895.000	-	-	-	94,25	61,94	72,06	37,51	-	15,92	(1,79)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.268.777.640	572.100.000	535.808.770	1.104.946.000	1.391.175.908	-	-	1.192.864.391	553.518.518	461.282.310	1.084.759.709	88.494.023	-	-	94,02	96,75	86,09	98,17	6,36	-	17,72	(6,74)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	153.051.600	185.500.000	220.808.770	215.046.000	315.775.908	-	-	149.187.591	170.005.068	198.142.310	205.645.443	70.993.763	-	-	97,48	91,65	89,73	95,63	22,48	-	21,12	(7,80)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	248.126.000	250.600.000	210.000.000	619.100.000	830.670.000	-	-	245.470.000	249.068.000	159.108.000	611.721.634	8.750.130	-	-	98,93	99,39	75,77	98,81	1,05	-	53,44	37,81
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	823.872.500	31.000.000	35.000.000	45.000.000	159.730.000	-	-	773.086.800	30.767.450	34.696.000	44.739.147	8.750.130	-	-	93,84	99,25	99,13	99,42	5,48	-	50,05	(33,69)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	43.727.540	105.000.000	70.000.000	225.800.000	85.000.000	-	-	25.120.000	103.678.000	69.336.000	222.653.485	-	-	-	57,45	98,74	99,05	98,61	-	-	66,75	166,91

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	10.434.782.701	4.279.882.895	4.259.166.656	4.515.301.982	3.537.164.009	-	-	9.558.486.730	4.126.184.548	4.053.162.726	4.354.494.644	1.944.266.511	-	-	91,60	96,41	95,16	96,44	54,97	-	(18,78)	(26,63)
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	60.019.843	188.761.840	444.250.000	385.065.600	718.998.457	-	-	6.625.000	185.153.000	390.832.880	360.647.560	395.575.000	-	-	11,04	98,09	87,98	93,66	55,02	-	105,81	701,95
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	60.019.843	188.761.840	444.250.000	385.065.600	716.498.457	-	-	6.625.000	185.153.000	390.832.880	360.647.560	395.575.000	-	-	11,04	98,09	87,98	93,66	55,21	-	105,65	701,95
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	9.347.504.486	2.352.395.764	2.141.692.936	2.667.979.798	1.905.227.062	-	-	8.578.093.903	2.267.454.399	2.074.474.375	2.582.668.575	976.789.597	-	-	91,77	96,39	96,86	96,80	51,27	-	(21,95)	(29,94)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	871.011.390	1.287.772.764	1.293.964.276	1.344.619.228	606.396.833	-	-	806.237.625	1.241.919.638	1.276.324.075	1.341.137.863	465.220.230	-	-	92,56	96,44	98,64	99,74	76,72	-	(0,66)	(0,86)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	-	1.255.613.045	80.000.000	60.000.000	91.500.000	93.193.292	-	-	1.154.373.596	79.048.471	53.812.513	79.579.291	27.144.054	-	-	91,94	98,81	89,69	86,97	29,13	-	(16,07)	(35,77)

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukorejo)																							
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sadeng)	-	846.472.331	74.000.000	56.700.000	85.925.000	81.832.290	-	-	769.628.609	72.051.307	51.168.680	78.903.556	29.839.645	-	-	90,92	97,37	90,24	91,83	36,46	-	(16,96)	(31,90)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kandri)	-	440.700.000	66.800.000	51.700.000	83.230.000	77.466.230	-	-	401.034.474	63.807.454	50.190.762	82.590.532	47.473.181	-	-	91,00	95,52	97,08	99,23	61,28	-	(13,35)	(20,85)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sekaran)	-	545.909.000	71.000.000	53.700.000	82.600.000	83.677.664	-	-	500.166.154	68.243.706	50.482.585	81.621.357	34.813.524	-	-	91,62	96,12	94,01	98,82	41,60	-	(14,06)	(27,01)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pongangan)	-	480.800.000	70.000.000	52.700.000	82.140.000	79.924.333	-	-	436.220.291	64.382.168	46.298.171	74.396.227	27.855.317	-	-	90,73	91,97	87,85	90,57	34,85	-	(14,25)	(28,80)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	417.600.000	68.908.000	51.700.000	81.630.000	78.662.047	-	-	385.491.237	66.891.710	51.046.282	77.571.826	28.711.112	-	-	92,31	97,07	98,74	95,03	36,50	-	(13,55)	(29,34)

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(Kelurahan Kalisegoro)																							
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatirejo)	-	291.768.720	75.000.000	51.628.660	80.256.000	80.223.237	-	-	265.625.396	67.430.352	43.907.315	74.411.373	21.510.870	-	-	91,04	89,91	85,04	92,72	26,81	-	(12,51)	(27,78)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngijo)	-	368.250.000	68.300.000	51.700.000	80.000.000	78.442.106	-	-	338.950.931	62.428.036	49.113.189	67.318.290	22.507.599	-	-	92,04	91,40	95,00	84,15	28,69	-	(13,24)	(33,10)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Patemon)	-	493.400.000	70.000.000	52.700.000	82.813.000	81.914.967	-	-	448.487.612	69.366.734	49.113.742	80.629.984	38.240.248	-	-	90,90	99,10	93,19	97,36	46,68	-	(13,62)	(25,53)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Nongkosawit)	-	443.000.000	45.150.000	51.700.000	80.250.000	77.678.055	-	-	407.718.466	44.715.916	49.885.023	75.779.564	30.276.050	-	-	92,04	99,04	96,49	94,43	38,98	-	(5,82)	(21,40)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cepoko)	-	317.000.000	38.115.000	50.700.000	80.420.000	78.742.570	-	-	288.665.950	37.719.200	45.872.250	66.587.915	27.413.350	-	-	91,06	98,96	90,48	82,80	34,81	-	0,39	(19,75)
Peningkatan Efektifitas	-	745.400.000	73.000.000	55.700.000	84.191.200	83.471.578	-	-	683.560.857	71.441.499	53.923.698	80.747.597	28.871.234	-	-	91,70	97,87	96,81	95,91	34,59	-	(15,90)	(32,14)

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunungpati)																							
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunsari)	-	455.600.000	70.000.000	50.000.000	82.000.000	79.998.242	-	-	418.651.157	67.753.250	49.393.656	80.395.867	39.163.421	-	-	91,89	96,79	98,79	98,04	48,96	-	(12,91)	(24,86)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pakintelan)	-	465.980.000	60.850.000	52.700.000	82.893.000	81.579.531	-	-	431.128.444	60.442.938	52.317.684	81.976.371	27.896.429	-	-	92,52	99,33	99,27	98,89	34,20	-	(11,16)	(27,18)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ((Kelurahan Plalangan)	-	390.400.000	69.000.000	51.700.000	82.000.000	79.506.811	-	-	362.588.716	66.815.322	49.280.154	79.768.539	38.528.520	-	-	92,88	96,83	95,32	97,28	48,46	-	(12,96)	(24,41)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumurrejo)	-	518.600.000	64.500.000	52.700.000	81.512.370	82.517.276	-	-	479.564.388	62.996.698	52.344.596	79.252.423	41.324.813	-	-	92,47	97,67	99,33	97,23	50,08	-	(12,49)	(25,06)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	**-**	1.027.258.372	1.738.725.291	1.673.223.720	1.462.256.584	912.938.490	-	-	973.767.827	1.673.577.149	1.587.855.471	1.411.178.509	571.901.914	-	-	94,79	96,25	94,90	96,51	62,64	-	3,83	(0,96)

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Dilimpahkan kepada Camat																							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	-	1.027.258.372	1.738.725.291	1.673.223.720	1.462.256.584	912.938.490	-	-	973.767.827	1.673.577.149	1.587.855.471	1.411.178.509	571.901.914	-	-	94,79	96,25	94,90	96,51	62,64	-	3,83	(0,96)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	21.524.915.009	26.321.406.668	30.801.844.366	30.558.766.671	46.219.710.476	-	-	20.587.458.943	25.956.431.550	30.341.605.540	28.903.741.477	7.010.553.434	-	-	95,64	98,61	98,51	94,58	15,17	-	22,44	(9,38)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	20.587.694.210	26.116.406.668	18.610.378.066	18.207.366.671	18.507.022.775	-	-	19.735.049.943	25.772.970.650	18.269.443.190	16.636.577.518	1.821.333.002	-	-	95,86	98,68	98,17	91,37	9,84	-	(0,60)	(24,13)
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	118.378.350	131.925.250	171.300.000	178.866.821	108.707.497	-	-	90.100.500	131.445.250	154.419.700	171.826.750	72.324.500	-	-	76,11	99,64	90,15	96,06	66,53	-	1,62	4,18
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	9.341.628.523	2.552.290.800	1.211.530.000	1.211.130.000	1.208.700.000	-	-	9.172.385.288	2.538.242.000	1.201.379.000	1.200.369.826	-	-	-	98,19	99,45	99,16	99,11	-	-	(31,36)	(41,69)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)	-	471.920.000	895.300.000	1.098.000.000	1.228.000.000	1.228.000.000	-	-	461.432.587	885.665.000	1.092.451.000	1.056.125.899	-	-	-	97,78	98,92	99,49	86,00	-	-	31,05	37,32
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sadeng)	-	446.413.975	668.300.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	435.678.070	654.973.000	943.862.000	917.239.835	17.782.200	-	-	97,60	98,01	99,35	96,55	1,87	-	22,96	(1,61)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kandri)	-	446.000.000	778.800.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	439.084.000	768.466.000	944.703.000	811.400.090	76.143.860	-	-	98,45	98,67	99,44	85,41	8,02	-	24,15	(1,69)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	464.571.000	797.750.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	434.057.126	788.995.000	946.327.000	885.948.008	76.321.300	-	-	93,43	98,90	99,61	93,26	8,03	-	22,70	0,99

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(Kelurahan Sekaran)																							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pongangan)	-	474.778.000	723.375.000	950.000.000	1.145.000.000	1.145.000.000	-	-	467.878.548	714.921.000	945.805.000	1.077.195.936	26.574.510	-	-	98,55	98,83	99,56	94,08	2,32	-	26,05	0,36
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)	-	479.000.000	771.572.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	473.957.000	759.974.000	947.198.000	768.939.504	17.712.270	-	-	98,95	98,50	99,71	80,94	1,86	-	21,05	(7,88)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)	-	482.530.083	690.950.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	469.208.490	681.564.000	944.204.000	780.517.107	76.613.360	-	-	97,24	98,64	99,39	82,16	8,06	-	20,17	(5,93)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngijo)	-	448.000.000	775.500.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	438.555.462	767.534.000	945.687.000	879.015.348	66.922.030	-	-	97,89	98,97	99,55	92,53	7,04	-	23,90	(0,30)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patemon)	-	447.000.000	712.850.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	435.762.723	701.322.000	946.013.000	940.565.617	65.708.260	-	-	97,49	98,38	99,58	99,01	6,92	-	23,19	0,56
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)	-	482.140.000	797.600.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	471.530.979	788.656.000	944.756.000	785.064.859	26.696.610	-	-	97,80	98,88	99,45	82,64	2,81	-	21,13	(6,61)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cepoko)	-	467.000.000	761.250.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	458.192.702	752.723.000	944.588.000	885.346.076	26.574.510	-	-	98,11	98,88	99,43	93,19	2,80	-	21,95	(3,37)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	-	447.000.000	771.000.000	950.000.000	971.000.000	971.000.000	-	-	439.777.212	763.834.000	944.388.000	894.071.119	26.641.110	-	-	98,38	99,07	99,41	92,08	2,74	-	24,48	(1,26)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	461.560.000	721.550.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	446.670.544	709.799.000	945.189.000	889.319.627	75.831.210	-	-	96,77	98,37	99,49	93,61	7,98	-	22,00	(1,33)

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(Kelurahan Mangunsari)																							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)	-	476.000.000	767.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	466.059.936	749.987.000	945.224.000	908.150.079	572.227.983	-	-	97,91	97,78	99,50	95,59	60,23	-	21,25	11,51
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Plalangan)	-	476.390.000	687.800.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	462.401.715	678.080.000	945.045.600	895.545.851	75.652.660	-	-	97,06	98,59	99,48	94,27	7,96	-	20,62	(2,69)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo)	-	447.000.000	746.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	-	434.380.606	734.083.000	944.988.000	790.548.164	43.146.960	-	-	97,18	98,40	99,47	83,22	4,54	-	23,56	(3,29)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	299.057.433	338.703.618	482.847.200	323.369.850	303.722.194	-	-	178.979.000	299.373.050	390.528.600	315.211.323	29.635.000	-	-	59,85	88,39	80,88	97,48	9,76	-	4,18	(3,04)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)	-	223.666.955	1.467.000.000	90.371.639	50.000.000	96.719.654	-	-	173.208.000	1.451.568.000	75.744.000	47.640.500	34.379.549	-	-	77,44	98,95	83,81	95,28	35,55	-	127,70	144,58
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sadeng)	-	229.196.694	1.058.000.000	92.824.439	50.000.000	79.874.172	-	-	187.472.500	1.050.219.375	88.453.500	49.850.000	20.900.000	-	-	81,80	99,26	95,29	99,70	26,17	-	71,00	66,73
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandri)	-	221.800.000	575.000.000	84.569.300	50.000.000	56.347.970	-	-	204.909.600	571.540.000	82.627.500	50.000.000	30.400.000	-	-	92,38	99,40	97,70	100,00	53,95	-	11,44	3,67
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)	-	219.720.000	702.400.000	92.771.139	50.000.000	87.240.455	-	-	201.222.050	699.040.000	82.377.000	49.459.000	29.250.000	-	-	91,58	99,52	88,80	98,92	33,53	-	40,32	19,59
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pongangan)	-	195.172.000	638.200.000	79.193.839	50.000.000	73.316.527	-	-	169.809.300	634.210.000	78.415.450	49.777.000	21.250.000	-	-	87,00	99,37	99,02	99,55	28,98	-	37,29	23,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)	-	195.000.000	531.800.000	80.379.489	50.000.000	71.038.700	-	-	173.448.455	531.060.000	80.278.500	50.000.000	36.106.700	-	-	88,95	99,86	99,87	100,00	50,83	-	23,03	13,95

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)	-	189.701.197	457.600.000	100.380.039	50.000.000	73.711.180	-	-	159.530.000	430.415.000	86.810.000	47.600.000	18.845.000	-	-	84,10	94,06	86,48	95,20	25,57	-	15,10	(3,90)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngijo)	-	261.050.000	517.075.000	91.307.739	50.000.000	79.514.800	-	-	243.370.000	512.080.000	82.820.000	47.416.500	33.600.000	-	-	93,23	99,03	90,70	94,83	42,26	-	7,38	(11,33)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patemon)	-	233.100.000	688.500.000	75.493.839	50.000.000	80.621.620	-	-	219.175.000	682.450.000	72.774.000	47.301.000	38.321.620	-	-	94,03	99,12	96,40	94,60	47,53	-	33,45	17,01
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)	-	181.860.000	551.250.000	84.930.869	50.000.000	61.920.166	-	-	166.199.750	542.372.500	64.491.340	49.190.000	17.875.000	-	-	91,39	98,39	75,93	98,38	28,87	-	25,31	12,71
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cepoko)	-	196.300.000	452.350.000	98.332.539	50.000.000	63.224.320	-	-	174.573.750	439.150.000	60.636.200	48.594.000	37.542.800	-	-	88,93	97,08	61,66	97,19	59,38	-	7,37	5,69
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	-	241.280.000	913.325.000	69.919.400	50.000.000	89.606.415	-	-	207.180.800	903.204.750	60.283.750	48.398.000	34.847.000	-	-	85,87	98,89	86,22	96,80	38,89	-	59,23	48,73
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)	-	200.040.000	609.800.000	96.152.108	50.000.000	66.265.836	-	-	190.209.500	609.795.600	86.988.650	49.507.500	22.950.000	-	-	95,09	100,00	90,47	99,02	34,63	-	26,28	9,53
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)	-	192.770.000	601.750.000	78.685.072	50.000.000	70.520.649	-	-	183.693.500	588.872.500	76.144.000	49.443.000	17.950.000	-	-	95,29	97,86	96,77	98,89	25,45	-	32,46	8,69
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plalangan)	-	207.720.000	591.800.000	92.192.508	50.000.000	66.874.757	-	-	198.484.000	589.820.000	85.286.400	50.000.000	20.100.000	-	-	95,55	99,67	92,51	100,00	30,06	-	22,12	2,61
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo)	-	222.950.000	671.040.000	89.196.908	50.000.000	75.095.863	-	-	206.471.250	667.536.625	88.557.000	50.000.000	34.507.000	-	-	92,61	99,48	99,28	100,00	45,95	-	30,13	15,51
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata	-	937.220.799	205.000.000	12.191.466.300	12.351.400.000	27.712.687.701	-	-	852.409.000	183.460.900	12.072.162.350	12.267.163.959	5.189.220.432	-	-	90,95	89,49	99,02	99,32	18,73	-	1.473,65	1.586,42

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
n Tingkat Kecamatan																							
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	122.473.071	155.000.000	122.880.600	127.000.000	122.191.417	-	-	79.850.000	133.461.250	115.048.100	104.695.743	7.250.000	-	-	65,20	86,10	93,63	82,44	5,93	-	1,35	(12,18)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sukorejo)	-	-	-	1.713.875.000	1.706.000.000	4.171.906.634	-	-	-	-	1.708.184.500	1.704.398.400	789.125.000	-	-	-	-	99,67	99,91	18,92	-	72,04	(26,96)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sadeng)	-	-	-	1.134.575.000	1.127.600.000	2.638.138.494	-	-	-	-	1.133.408.750	1.126.024.500	506.819.000	-	-	-	-	99,90	99,86	19,21	-	66,67	(27,82)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kandri)	-	-	-	593.200.000	591.800.000	1.325.889.228	-	-	-	-	592.222.500	591.671.740	257.030.000	-	-	-	-	99,84	99,98	19,39	-	61,90	(28,33)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sekaran)	-	-	-	791.575.000	792.800.000	1.741.604.334	-	-	-	-	789.563.250	789.616.999	326.375.000	-	-	-	-	99,75	99,60	18,74	-	59,92	(29,33)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pongangan)	-	-	-	658.175.000	651.200.000	1.434.777.324	-	-	-	-	657.975.000	649.772.500	285.640.000	-	-	-	-	99,97	99,78	19,91	-	59,63	(28,64)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalisegoro)	-	-	-	580.175.000	573.200.000	1.237.252.963	-	-	-	-	578.925.000	573.046.000	225.600.000	-	-	-	-	99,78	99,97	18,23	-	57,32	(30,82)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirejo)	-	-	-	410.614.000	404.600.000	802.018.435	-	-	-	-	408.086.000	402.152.000	159.600.000	-	-	-	-	99,38	99,39	19,90	-	48,38	(30,88)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngijo)	-	-	-	594.275.000	585.800.000	1.237.111.160	-	-	-	-	593.073.000	582.448.000	235.951.000	-	-	-	-	99,80	99,43	19,07	-	54,88	(30,64)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Patemon)	-	-	-	710.650.000	858.200.000	1.912.715.284	-	-	-	-	706.147.000	856.307.500	386.752.747	-	-	-	-	99,37	99,78	20,22	-	71,82	(16,79)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	606.800.000	627.200.000	1.391.879.415	-	-	-	-	602.258.750	626.813.000	258.675.000	-	-	-	-	99,25	99,94	18,58	-	62,64	(27,33)

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(Kelurahan Nongkosawit)																							
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cepoko)	-	-	-	447.561.100	440.000.000	908.896.290	-	-	-	-	435.640.000	424.225.000	171.100.000	-	-	-	-	97,34	96,41	18,83	-	52,44	(31,14)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunungpati)	-	-	-	1.026.525.000	1.015.400.000	2.289.126.367	-	-	-	-	1.023.502.500	1.013.704.500	436.275.000	-	-	-	-	99,71	99,83	19,06	-	62,18	(28,96)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mangunsari)	-	-	-	624.410.600	682.400.000	1.593.242.428	-	-	-	-	622.034.500	680.629.000	301.427.685	-	-	-	-	99,62	99,74	18,92	-	71,38	(23,15)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pakintelan)	-	-	-	641.575.000	635.600.000	1.370.078.209	-	-	-	-	641.473.000	635.346.875	273.425.000	-	-	-	-	99,98	99,96	19,96	-	57,31	(28,96)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Plalangan)	-	-	-	544.975.000	537.800.000	1.106.589.939	-	-	-	-	541.507.500	534.321.250	225.550.000	-	-	-	-	99,36	99,35	20,38	-	52,22	(29,56)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sumurrejo)	-	-	-	739.625.000	744.800.000	1.675.305.150	-	-	-	-	739.610.000	744.597.750	330.325.000	-	-	-	-	100,00	99,97	19,72	-	62,82	(27,48)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	11.300.000	-	-	-	-	-	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	34,51	-	0,00	0,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	814.747.728	50.000.000	250.000.000	250.000.000	742.664.630	-	-	772.559.000	49.999.650	183.503.000	227.393.202	8.400.000	-	-	94,82	100,00	73,40	90,96	1,13	-	125,80	25,27
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	260.087.215	40.131.100	53.475.000	38.025.000	135.306.318	-	-	247.071.600	40.110.100	53.458.750	37.235.000	9.575.000	-	-	95,00	99,95	99,97	97,92	7,08	-	43,91	(38,78)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	260.087.215	40.131.100	53.475.000	38.025.000	135.306.318	-	-	247.071.600	40.110.100	53.458.750	37.235.000	9.575.000	-	-	95,00	99,95	99,97	97,92	7,08	-	43,91	(38,78)

Uraian	Anggaran (Rp.)							Realisasi Anggaran (Rp.)							Rasio antara Realisasi dengan Anggaran (%)							Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	pada Tahun ke-							pada Tahun ke-							pada Tahun ke-								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Realisasi Semester I)	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	-	260.087.215	40.131.100	53.475.000	38.025.000	135.306.318	-	-	247.071.600	40.110.100	53.458.750	37.235.000	9.575.000	-	-	95,00	99,95	99,97	97,92	7,08	-	43,91	(38,78)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	11.700.000	280.550.000	101.025.000	140.850.000	-	-	-	11.520.000	254.940.000	90.525.000	32.450.000	-	-	-	98,46	90,87	89,61	23,04	-	757,76	661,46
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	-	-	11.700.000	280.550.000	101.025.000	140.850.000	-	-	-	11.520.000	254.940.000	90.525.000	32.450.000	-	-	-	98,46	90,87	89,61	23,04	-	757,76	661,46
Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	11.700.000	280.550.000	101.025.000	140.850.000	-	-	-	11.520.000	254.940.000	90.525.000	32.450.000	-	-	-	98,46	90,87	89,61	23,04	-	757,76	661,46

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

c. Kinerja Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Gunungpati senantiasa menyelenggarakan pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, partisipasi, serta berorientasi pada hasil. Penyelenggaraan pelayanan tersebut berpedoman pada tiga bidang utama pembangunan, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan manusia, dan bidang kesejahteraan masyarakat.

1) Pengarusutamaan Gender dan Anggaran responsif Gender
Kecamatan Gunungpati berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberi manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender diproyeksikan sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Implementasi Anggaran Responsif Gender juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.
2) Kota Layak Anak
Sebagai bagian dari Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terhadap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA.
3) Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan masih menjadi tantangan di Kecamatan Gunungpati. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada strategi pemberdayaan masyarakat, penguatan akses permodalan, peningkatan keterampilan, serta optimalisasi program perlindungan sosial. Sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan stakeholder lainnya diperlukan agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
4) Percepatan Penurunan Stunting
Dalam rangka percepatan penurunan stunting, kecamatan Gunungpati melaksanakan kegiatan koordinasi lintas sektor serta memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu dan PKK, mendukung penyuluhan gizi, serta menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam kegiatan kesehatan dan pola hidup bersih sehat.
5) Kecamatan Berdaya
Kecamatan Berdaya merupakan upaya membangun kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta partisipasi aktif warga dalam pembangunan.

6) Posyandu 6 Layanan SPM
   Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah konsep yang mengintegrasikan enam bidang pelayanan yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketertiban Umum dan sosial. Kecamatan berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan pembina agar Posyandu 6 SPM berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.
7) Kerukunan Umat Beragama
   Kerukunan antarumat beragama menjadi fondasi utama kehidupan sosial di Kecamatan Gunungpati. Pemerintah Kecamatan berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya budaya toleransi, saling menghormati, dan gotong royong dalam bingkai kebhinekaan.
8) Indeks Harmoni
   Kecamatan Gunungpati berperan penting dalam mendukung Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Pada dimensi ekonomi, kecamatan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi UMKM, koperasi, serta akses bantuan sosial secara adil dan transparan. Pada dimensi sosial, kecamatan menguatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang, kegiatan gotong royong, serta mediasi konflik sosial di tingkat lokal.
   Dalam dimensi budaya, kecamatan berkomitmen melestarikan kearifan lokal dan memperkuat toleransi antar komunitas melalui kegiatan seni, tradisi, dan budaya. Sementara pada dimensi keberagamaan, kecamatan memfasilitasi dialog antarumat beragama, mendukung kegiatan sosial-keagamaan, serta melakukan pengawasan partisipatif terhadap potensi intoleransi. Dengan demikian, kecamatan menjadi koordinator, fasilitator, dan mediator yang menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

d. Mitra Kecamatan Gunungpati dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Gunungpati menjalin kemitraan strategis dengan berbagai unsur pelaksana pelayanan yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- Kelurahan, sebagai ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan program pelayanan dasar.
- Koramil, yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
- Polsek, sebagai mitra dalam penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan koordinasi keamanan lingkungan.
- Puskesmas, sebagai penyedia layanan kesehatan primer yang mendukung pencapaian indikator kesehatan masyarakat.
- KORLAP UP2AKBPA, yang berperan dalam pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, serta peningkatan kualitas hidup keluarga.
- Masyarakat, sebagai subjek dan objek pelayanan yang dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- KUA, sebagai mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, pembinaan keluarga sakinah, dan pencatatan pernikahan.

- UPTD Pendidikan, yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui koordinasi program pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan.

e. Inovasi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Terkait pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) SATE SETIK (Satukan Tekad Sedekah Plastik)
Merupakan program pengolahan sampah plastik yang sudah tidak bermanfaat, kemudian diolah menjadi bahan bakar minyak.
2) POINT DUA (Pojok Informasi Digital Untuk Warga)
Merupakan salah satu bentuk inovasi Kecamatan Gunungpati dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi.
3) Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB
Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun di Kelurahan di Kecamatan Gunungpati. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.

f. Penghargaan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kecamatan Gunungpati berhasil memperoleh penghargaan yang diakui di berbagai tingkat, antara lain:

1) Juara 1 Lomba Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat / Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
2) Bina Keluarga Balita Harapan Bangsa Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati mendapat Nominasi Regional 2 pada Penilaian BKB Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2024;
3) Bina Keluarga Balita Harapan Bangsa Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati mendapat juara terbaik 1 Kelompok Bina Keluarga Balita Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
4) Juara 1 Lomba Puskesmas TerGermas Tingkat Prov Jateng yang diperoleh Bank sampah alamanda Kelurahan Mangunsari dan Puskesmas Gunungpati;
5) Kampung KB Kokolaka Penerimaan Satya Lancana Gubernur Jawa Tengah Tingkat Nasional Th. 2023;
6) Juara Nasional Proklim Aksi Mitigasi dan Adaptasi Setara Nasional Th. 2023;
7) Kampung Jawi kelurahan Sukorejo menerima penghargaan Peringkat I Trisakti Tourism Award 2021 dengan tema Desa Wisata Kategori Kuliner;
8) Desa wisata di Kelurahan Kandri menerima penghargaan desa wisata berkelanjutan tingkat nasional dari Kemenparenkraf Tahun 2021;
9) Juara III petani teladan tingkat jawa tengah (kelurahan kandri) Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

1.5.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gunungpati dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Gunungpati sebagai berikut:

- Belum optimalnya struktur dan kapasitas kelembagaan, yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar unit kerja.
- Kualitas pelayanan publik yang belum konsisten, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat.
- Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses pelayanan dan monitoring belum sepenuhnya digital dan efisien.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, yang menyebabkan rendahnya dampak pembangunan berbasis komunitas.
- Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang mempengaruhi pelaksanaan program secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Gunungpati untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- Dukungan kebijakan pemerintah kota dan nasional terhadap penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- Kemajuan teknologi digital, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi pengelolaan data.
- Potensi kolaborasi lintas sektor, baik dengan OPD lain, lembaga masyarakat, maupun perguruan tinggi untuk inovasi pelayanan dan pemberdayaan.
- Semangat reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja, yang mendorong perbaikan sistem dan budaya kerja.
- Ketersediaan SDM yang berdedikasi dan terbuka terhadap pengembangan kapasitas, sebagai modal penting dalam transformasi pelayanan.

1.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gunungpati masih dihadapkan pada berbagai permasalahan serta potensi isu strategis yang berpeluang muncul di masa mendatang, sehingga perlu diantisipasi melalui perencanaan dan kebijakan yang tepat. Identifikasi permasalahan dan isu strategis ini menjadi langkah awal dalam merumuskan tujuan, sasaran, serta strategi pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah.

1.6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Gunungpati telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hasil evaluasi capaian kinerja dan analisis kondisi wilayah menunjukkan masih adanya permasalahan utama, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan utama tersebut diuraikan lebih lanjut dalam bentuk permasalahan dan akar masalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.7
Rumusan Permasalahan
"Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gunungpati"

No	PERMASALAHAN OPD	AKAR MASALAH
1	2	3
1	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Gunungpati	Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gunungpati
		Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gunungpati
		Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gunungpati
2	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Gunungpati	Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gunungpati
		Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gunungpati
		Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Gunungpati
		Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gunungpati
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gunungpati
3	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati
		Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gunungpati
		Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati
		Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gunungpati

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

Selain itu masalah umum yang terjadi di Kecamatan Gunungpati adalah sebagaimana berikut :

1. Persebaran sekolah khususnya tingkat SMP dan SMA negeri tidak merata.
2. Kondisi jalan yang masih banyak yang rusak baik jalan Provinsi maupun jalan kota.
3. Masih terdapat 1 kelurahan yang tidak memiliki trayek transportasi tetap, yakni Kelurahan Jatirejo
4. Terbatasnya jumlah pasar yang tersedia yakni hanya 2 pasar
5. Masih terdapat balita stunting.
6. Terbatasnya fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas
7. Kondisi geografis yang perbukitan menyebabkan sering terjadi pohon tumbang, dan sering terjadi bencana longsor maupun banjir terutama pada musim hujan

1.6.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia

Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan saranan prasarana, serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari Dan Inklusif”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

1) **Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif**, dirumuskan tujuan sebagai berikut:
    a. **Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing.**
    b. **Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat.**
    c. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.**
    d. **Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.**

2) **Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif**, dirumuskan tujuan **Menurunnya kemiskinan secara inklusif.**
3) **Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif**, dirumuskan tujuan **Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat.**
4) **Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dirumuskan tujuan **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat**.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus PadaKebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3 **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.**

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong

program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4 **Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5 **Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan**
Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang

mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6 **Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.**

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7 **Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.**

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Visi dan misi Kota Semarang didukung dengan tagline:

Tabel 2.8
Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

SEMARANG BERSATU, SEMARANG SEMAKIN HEBAT!	
Bangun Infrastruktur Berkualitas	Humanis dalam Melayani
Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan	Ekonomi Inklusif
Ramah Lingkungan	Budaya yang Dilestarikan
Sosial Harmonis Tanpa Konflik	Aksesibilitas Meningkat
Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin	Tangguh menghadapi Tantangan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Utamakan Kesejahteraan Bersama	

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Kecamatan Gunungpati, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, berkomitmen mendukung terwujudnya Visi Kota Semarang **"Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif"** dengan pokok visi **"Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif"** yang bertujuan **"Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat"**. Selaras dengan Misi Kota Semarang **"Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih,**

Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas", Kecamatan Gunungpati melalui tugas pokok dan fungsinya berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

c. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Gunungpati tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksudkan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan di Kecamatan Gunungpati. Dengan membandingkan struktur dan pola ruang eksisting, Kecamatan Gunungpati dapat menentukan arah pengembangan pelayanan secara geografis, memperkirakan kebutuhan pelayanan, dan menetapkan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Gunungpati dapat menyusun rancangan program dan target yang sejalan dengan kebijakan penataan ruang Kota Semarang. Pemanfaatan pembagian wilayah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031.

1) Posisi Kecamatan Gunungpati dalam RTRW

Dalam sistem pengembangan wilayah, Kecamatan Gunungpati termasuk Bagian Wilayah Kota (BWK) VIII dengan fungsi utama:

1. Kawasan Pendidikan Tinggi – mendukung pengembangan universitas, politeknik, sekolah tinggi, dan fasilitas penelitian.
2. Paru-paru Kota – berperan sebagai kawasan lindung, resapan air, dan penyedia ruang terbuka hijau skala kota.

2) Kebijakan Penataan Ruang yang Relevan untuk Gunungpati

Kebijakan penataan ruang Kota Semarang yang relevan bagi Kecamatan Gunungpati meliputi:

a. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang mendukung perdagangan dan jasa berskala internasional.
b. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan melalui jaringan jalan dan transportasi publik.
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana umum.
d. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung (termasuk daerah resapan air dan kawasan dengan kemiringan >40%).
e. Pelestarian kawasan cagar budaya dan situs sejarah.

f. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota.

g. Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

h. Pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien.

i. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai (terkait dalam konteks kota secara keseluruhan).

j. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

k. Pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup.

l. Pengembangan kawasan strategis sosial budaya.

3) Rencana Struktur Ruang Kecamatan Gunungpati

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2021, rencana struktur ruang BWK VIII (Gunungpati) meliputi:

- Pusat Kegiatan:
  a. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Kelurahan Gunungpati, Plalangan, Cepoko, dan Nongkosawit, dilengkapi sarana ekonomi, sosial, dan administrasi dengan ruang interaksi publik (RTH/RTNH).
  b. Pusat Lingkungan:
     1. Pusat Lingkungan VIII.1 di Kelurahan Nongkosawit, melayani Kelurahan Gunungpati, Plalangan, Cepoko, Jatirejo, Kandri, Pongangan, dan Sadeng.
     2. Pusat Lingkungan VIII.2 di Kelurahan Sekaran, melayani Kelurahan Sumurejo, Pakintelan, Mangunsari, Ngijo, Patemon, Kalisegoro, dan Sukorejo.
- Sistem Jaringan Prasarana:
  a. Peningkatan jaringan jalan kolektor dan lokal untuk konektivitas ke pusat kota dan kecamatan sekitar.
  b. Dukungan infrastruktur energi melalui jalur SUTET dan SUTT yang melewati Gunungpati.
  c. Penguatan sistem air bersih, sanitasi, dan drainase berkelanjutan untuk menjaga fungsi lindung.

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Gunungpati Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

Berdasarkan KLHS, isu yang terkait dengan Kecamatan Gunungpati berfokus pada Penyelenggaraan *Good Governance*, yang mencakup upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Isu-isu ini tidak hanya berhubungan dengan peningkatan mutu pelayanan publik, tetapi juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kesadaran hukum serta ketertiban umum. Identifikasi isu ini penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program kerja yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memudahkan pemahaman, isu-isu strategis tersebut telah dikategorikan ke dalam tema besar yang menggambarkan prioritas pembangunan di Kecamatan Gunungpati. Rincian tema dan isu yang masuk dalam kriteria strategis dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Penyelenggaraan *Good Governance*	Standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

1.6.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Gunungpati

Hasil analisis permasalahan pembangunan di Kota Semarang dan Kecamatan Gunungpati, yang didukung telaahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menjadi dasar perumusan isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Gunungpati sebagai berikut:

Tabel 2.10
Isu Perangkat Daerah
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Gunungpati	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Gunungpati
	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Gunungpati					Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati
	belum optimalnya					peningkatan kesadaran

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati					masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Gunungpati

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Kecamatan Gunungpati sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati.

1.7. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Gunungpati sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Gunungpati. Adapun tujuan Kecamatan Gunungpati untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yaitu :

1. “Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Gunungpati”. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpati (IKM) (60%); Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (20%); serta Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan (20%).
2. “Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Gunungpati”. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan aktif (20%); Partisipasi musyawarah rencana pembangunan dari seluruh elemen masyarakat (30%); serta Efektivitas kegiatan yang berdampak sosial, ekonomi, lingkungan (50%).

Dalam rangka pencapaian tujuan pada Kecamatan Gunungpati, ditetapkan sasaran sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpati
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungpati.

Indikator ini mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpati
Indikator ini mengacu pada pedoman survey kepuasan masyarakat dalam Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pelayanan Publik Kecamatan Gunungpati
Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gunungpati”. Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Gunungpati terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati
Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati”. Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Gunungpati melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Gunungpati.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gunungpati	Angka		96,79	96,8	96,81	96,82	96,83	
		Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungpati	Nilai	78,35	78,36	78,37	78,38	78,39	78,4	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpati	Angka	89,5	94,65	94,66	94,67	94,68	94,69	
		Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan Gunungpati	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan Gunungpati	Persen		90%	92%	94%	96%	98%	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan Gunungpati	Nilai		80	81	82	83	84	
		Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati	Angka		80 angka	82 Angka	84 Angka	86 Angka	88 Angka	

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

1.8. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Gunungpati mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

1.8.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Gunungpati dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gunungpati	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gunungpati	Memaksimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gunungpati	Menguatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gunungpati	Menyempurnakan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gunungpati
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati	Penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati	Percepatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati
pengembangan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati	penguatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati	percepatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati	perwujudan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

1.8.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Gunungpati agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Gunungpati merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Gunungpati.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Gunungpati Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan,dan bebas korupsi.	Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gunungpati	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gunungpati	
			Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gunungpati	
			Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gunungpati	
			Peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gunungpati	
			Peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Gunungpati	
			Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gunungpati	
			Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gunungpati	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.	Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati	
			Peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gunungpati	
			Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati	
			Peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gunungpati	

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan kecamatan gunungpati	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik kecamatan gunungpati	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kecamatan gunungpati
			Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gunungpati
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gunungpati	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati	Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gunungpati
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati	Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gunungpati

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.9. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Gunungpati

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpati melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Gunungpati untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Kecamatan Gunungpati perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Gunungpati

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati**				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gunungpati**		**Camat**
					Nilai Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati		
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kecamatan Gunungpati			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungpati (Angka)		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpati (Angka)		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunungpati		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gunungpati yang berkualitas	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sekretaris Kecamatan
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunungpati	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gunungpati	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati yang selesai ditindaklanjuti	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati sesuai ketentuan	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
		Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gunungpati			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gunungpati		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Gunungpati yang tepat waktu	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Seksi Pemerintahan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Kepala Seksi Pelayanan Publik

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Gunungpati	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Seksi Pelayanan Publik
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sukorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sukorejo		Lurah Sukorejo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Sukorejo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sadeng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sadeng		Lurah Sadeng
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Sadeng
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kandri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kandri		Lurah Kandri
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Kandri
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sekaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sekaran		Lurah Sekaran
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Sekaran
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pongangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pongangan		Lurah Pongangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Pongangan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kalisegoro	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalisegoro		Lurah Kalisegoro
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Kalisegoro
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatirejo		Lurah Jatirejo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Jatirejo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Ngijo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngijo		Lurah Ngijo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Ngijo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Patemon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Patemon		Lurah Patemon
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Patemon
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Nongkosawit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Nongkosawit		Lurah Nongkosawit

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Nongkosawit
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Cepoko	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cepoko		Lurah Cepoko
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Cepoko
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gunungpati		Lurah Gunungpati
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Gunungpati
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mangunsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangunsari		Lurah Mangunsari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Mangunsari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pakintelan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pakintelan		Lurah Pakintelan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Pakintelan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Plalangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Plalangan		Lurah Plalangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Plalangan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sumurrejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sumurrejo		Lurah Sumurrejo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris Kelurahan/Staf Kelurahan Sumurrejo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Seksi Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sukorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sukorejo		Lurah Sukorejo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Sukorejo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sadeng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sadeng		Lurah Sadeng
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Sadeng
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kandri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kandri		Lurah Kandri
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Kandri

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sekaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sekaran		Lurah Sekaran
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Sekaran
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pongangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pongangan		Lurah Pongangan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Pongangan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kalisegoro	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kalisegoro		Lurah Kalisegoro
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sekretaris/Kasie Pembangunan/Staf Kelurahan Kalisegoro
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatirejo		Lurah Jatirejo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Jatirejo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Ngijo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngijo		Lurah Ngijo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Ngijo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Patemon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Patemon		Lurah Patemon
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kepala Seksi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan/Staf Kelurahan Patemon
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Nongkosawit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Nongkosawit		Lurah Nongkosawit
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Nongkosawit
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Cepoko	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cepoko		Lurah Cepoko
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Cepoko
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gunungpati		Lurah Gunungpati
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Gunungpati
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangunsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangunsari		Lurah Mangunsari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Mangunsari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pakintelan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pakintelan		Lurah Pakintelan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Pakintelan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Plalangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Plalangan		Lurah Plalangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Plalangan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sumurrejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sumurrejo		Lurah Sumurrejo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan/Staf Kelurahan Sumurrejo
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang		Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati			Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati		Camat
			Meningkatnya keaktifan lembaga		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kemasyarakatan dalam pembangunan			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan gunungpati	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Seksi Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Gunungpati	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Gunungpati	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sukorejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sukorejo		Lurah Sukorejo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Sukorejo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sadeng	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sadeng		Lurah Sadeng
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Sadeng
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kandri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kandri		Lurah Kandri
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Kandri
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sekaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sekaran		Lurah Sekaran
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Sekaran

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pongangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pongangan		Lurah Pongangan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Pongangan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalisegoro		Lurah Kalisegoro
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Kalisegoro
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Jatirejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatirejo		Lurah Jatirejo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Jatirejo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Ngijo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngijo		Lurah Ngijo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Ngijo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Patemon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Patemon		Lurah Patemon
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Patemon
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Nongkosawit		Lurah Nongkosawit
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahanl/Staf Kelurahan Nongkosawit

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Cepoko	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Cepoko		Lurah Cepoko
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahanl/Staf Kelurahan Cepoko
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Gunungpati	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gunungpati		Lurah Gunungpati
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Gunungpati
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mangunsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mangunsari		Lurah Mangunsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Mangunsari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pakintelan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pakintelan		Lurah Pakintelan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Pakintelan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Plalangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Plalangan		Lurah Plalangan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Staf Kelurahan Plalangan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sumurrejo		Lurah Sumurrejo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahanl/Staf Kelurahan Sumurrejo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gunungpati	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sukorejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sukorejo		Lurah Sukorejo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Sukorejo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sadeng	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sadeng		Lurah Sadeng
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Sadeng
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kandri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kandri		Lurah Kandri
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Kandri
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sekaran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sekaran		Lurah Sekaran
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Sekaran
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pongangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pongangan		Lurah Pongangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Pongangan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalisegoro	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalisegoro		Lurah Kalisegoro
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Kalisegoro
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatirejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatirejo		Lurah Jatirejo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Jatirejo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngijo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngijo		Lurah Ngijo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Ngijo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Patemon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Patemon		Lurah Patemon
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Patemon
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Nongkosawit	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Nongkosawit		Lurah Nongkosawit

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Nongkosawit
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cepoko	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cepoko		Lurah Cepoko
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Cepoko
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gunungpati	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gunungpati		Lurah Gunungpati
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Gunungpati
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mangunsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangunsari		Lurah Mangunsari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Mangunsari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pakintelan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pakintelan		Lurah Pakintelan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Pakintelan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Plalangan		Lurah Plalangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				mitra pemerintah di Kelurahan Plalangan			
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Plalangan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sumurrejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sumurrejo		Lurah Sumurrejo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Sumurrejo
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

Bentuk dukungan Kecamatan terhadap pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunungpati		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3	Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7	Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
8	Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2025 – 2029

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan di Kecamatan Gunungpati Tahun 2026 – 2030, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Kecamatan Gunungpati
Kota Semarang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI					59.903.311.818		64.810.271.648		66.946.008.968		67.338.313.566		68.263.678.868	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.571.094.804		29.582.597.256		30.893.343.298		31.134.108.721		31.702.024.492	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunungpati	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gunungpati yang berkualitas	%	100	100	24.379.620.987	100	25.555.675.916	100	26.788.456.231	100	28.082.875.518	100	29.442.015.728	
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					27.670.000		29.311.200		29.311.200		29.311.200		29.311.200	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	%	N/A	100	27.670.000	100	29.311.200	100	29.311.200	100	29.311.200	100	29.311.200	
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					539.200		1.078.400		1.078.400		1.078.400		1.078.400	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	539.200	4	1.078.400	4	1.078.400	4	1.078.400	4	1.078.400	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					506.000		1.012.000		1.012.000		1.012.000		1.012.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	506.000	1	1.012.000	1	1.012.000	1	1.012.000	1	1.012.000	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					596.000		1.192.000		1.192.000		1.192.000		1.192.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	596.000	1	1.192.000	1	1.192.000	1	1.192.000	1	1.192.000	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					506.000		506.000		506.000		506.000		506.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	506.000	1	506.000	1	506.000	1	506.000	1	506.000	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					298.000		298.000		298.000		298.000		298.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	298.000	1	298.000	1	298.000	1	298.000	1	298.000	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					224.800		224.800		224.800		224.800		224.800	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	5	224.800	5	224.800	5	224.800	5	224.800	5	224.800	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.351.950.987		25.526.364.716		26.759.145.031		28.053.564.318		29.412.704.528	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	%	100	100	24.351.950.987	100	25.526.364.716	100	26.759.145.031	100	28.053.564.318	100	29.412.704.528	
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					23.481.613.787		24.655.690.316		25.888.470.631		27.182.889.918		28.542.030.128	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	105	130	23.481.613.787	130	24.655.690.316	130	25.888.470.631	130	27.182.889.918	130	28.542.030.128	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					870.000.000		870.000.000		870.000.000		870.000.000		870.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	870.000.000	12	870.000.000	12	870.000.000	12	870.000.000	12	870.000.000	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					112.400		224.800		224.800		224.800		224.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	112.400	1	224.800	1	224.800	1	224.800	1	224.800	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					112.400		224.800		224.800		224.800		224.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	12	112.400	12	224.800	12	224.800	12	224.800	12	224.800	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					112.400		224.800		224.800		224.800		224.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	112.400	1	224.800	1	224.800	1	224.800	1	224.800	Kecamatan Gunungpati
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunungpati				2.191.473.817		4.026.921.340		4.104.887.067		3.051.233.203		2.260.008.764	
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					45.000.000		51.750.000		53.820.000		54.223.650		56.392.596	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gunungpati	Nilai	N/A	90	45.000.000	91	51.750.000	92	53.820.000	93	54.223.650	94	56.392.596	
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					20.000.000		23.000.000		23.920.000		24.099.400		25.063.376	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	4	20.000.000	4	23.000.000	4	23.920.000	4	24.099.400	4	25.063.376	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					25.000.000		28.750.000		29.900.000		30.124.250		31.329.220	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	100	25.000.000	100	28.750.000	100	29.900.000	100	30.124.250	100	31.329.220	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					305.537.244		351.367.831		365.422.544		368.163.213		382.889.742	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati	%	100	100	305.537.244	100	351.367.831	100	365.422.544	100	368.163.213	100	382.889.742	
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					100.000.000		115.000.000		119.600.000		120.497.000		125.316.880	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	12	100.000.000	12	115.000.000	12	119.600.000	12	120.497.000	12	125.316.880	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.164.244		5.938.881		6.176.436		6.222.759		6.471.670	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4	5.164.244	4	5.938.881	4	6.176.436	4	6.222.759	4	6.471.670	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.000.000		17.250.000		17.940.000		18.074.550		18.797.532	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	15.000.000	12	17.250.000	12	17.940.000	12	18.074.550	12	18.797.532	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					85.373.000		98.178.950		102.106.108		102.871.904		106.986.780	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	85.373.000	12	98.178.950	12	102.106.108	12	102.871.904	12	106.986.780	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					100.000.000		115.000.000		119.600.000		120.497.000		125.316.880	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	7	2	100.000.000	2	115.000.000	2	119.600.000	2	120.497.000	2	125.316.880	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000		115.000.000		119.600.000		120.497.000		125.316.880	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	%	100	100	100.000.000	100	115.000.000	100	119.600.000	100	120.497.000	100	125.316.880	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000		115.000.000		119.600.000		120.497.000		125.316.880	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	5	100.000.000	5	115.000.000	5	119.600.000	5	120.497.000	5	125.316.880	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					754.253.593		2.374.118.082		2.385.971.679		1.319.425.950		458.929.220	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	754.253.593	100	2.374.118.082	100	2.385.971.679	100	1.319.425.950	100	458.929.220	
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					210.934.520		242.574.698		252.277.686		254.169.769		264.336.559	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	210.934.520	12	242.574.698	12	252.277.686	12	254.169.769	12	264.336.559	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					543.319.073		2.131.543.384		2.133.693.993		1.065.256.181		194.592.661	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	12	543.319.073	12	2.131.543.384	12	2.133.693.993	12	1.065.256.181	12	194.592.661	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					986.682.980		1.134.685.427		1.180.072.844		1.188.923.390		1.236.480.326	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati sesuai ketentuan	%	100	100	986.682.980	100	986.682.980	100	986.682.980	100	986.682.980	100	986.682.980	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					336.682.980		387.185.427		402.672.844		405.692.890		421.920.606	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	53	53	336.682.980	53	387.185.427	53	402.672.844	53	405.692.890	53	421.920.606	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					150.000.000		172.500.000		179.400.000		180.745.500		187.975.320	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	5	150.000.000	5	172.500.000	5	179.400.000	5	180.745.500	5	187.975.320	Kecamatan Gunungpati
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					500.000.000		575.000.000		598.000.000		602.485.000		626.584.400	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	4	500.000.000	4	575.000.000	4	598.000.000	4	602.485.000	4	626.584.400	Kecamatan Gunungpati
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.575.415.720		5.059.474.686		5.270.159.680		5.308.859.519		5.400.144.426	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	%	100	100	4.575.415.720	100	5.059.474.686	100	5.270.159.680	100	5.308.859.519	100	5.400.144.426	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					455.000.000		485.813.237		513.551.773		504.685.533		595.009.605	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	%	N/A	100	5.000.000	100	5.550.000	100	5.772.000	100	5.829.720	100	5.830.886	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					5.000.000		5.550.000		5.772.000		5.829.720		5.830.886	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	N/A	1	5.000.000	1	5.550.000	1	5.772.000	1	5.829.720	1	5.830.886	Kecamatan Gunungpati
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				450.000.000		480.263.237		507.779.773		498.855.813		589.178.719	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					450.000.000		480.263.237		507.779.773		498.855.813		589.178.719	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	450.000.000	2	480.263.237	2	507.779.773	2	498.855.813	2	589.178.719	Kecamatan Gunungpati
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					1.770.415.720		1.965.161.449		2.043.767.907		2.064.205.586		2.064.618.427	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Gunungpati	%	100	100	300.415.720	100	333.461.449	100	346.799.907	100	350.267.906	100	350.337.960	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					300.415.720		333.461.449		346.799.907		350.267.906		350.337.960	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	300.415.720	12	333.461.449	12	346.799.907	12	350.267.906	12	350.337.960	Kecamatan Gunungpati
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sukorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sukorejo	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Sukorejo
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sadeng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sadeng	%	100	100	95.000.000	100	105.450.000	100	109.668.000	100	110.764.680	100	110.786.833	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					95.000.000		105.450.000		109.668.000		110.764.680		110.786.833	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	95.000.000	12	105.450.000	12	109.668.000	12	110.764.680	12	110.786.833	Kelurahan Sadeng
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kandri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kandri	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Kandri
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sekaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sekaran	%	100	100	95.000.000	100	105.450.000	100	109.668.000	100	110.764.680	100	110.786.833	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					95.000.000		105.450.000		109.668.000		110.764.680		110.786.833	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Laporan	12	12	95.000.000	12	105.450.000	12	109.668.000	12	110.764.680	12	110.786.833	Kelurahan Sekaran

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pongangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pongangan	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Pongangan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kalisegoro	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalisegoro	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Kalisegoro
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatirejo	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Jatirejo
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Ngijo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngijo	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Ngijo
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Patemon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	%	100	100	95.000.000	100	105.450.000	100	109.668.000	100	110.764.680	100	110.786.833	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Patemon													
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					95.000.000		105.450.000		109.668.000		110.764.680		110.786.833	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	95.000.000	12	105.450.000	12	109.668.000	12	110.764.680	12	110.786.833	Kelurahan Patemon
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Nongkosawit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Nongkosawit	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Nongkosawit
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Cepoko	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cepoko	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Cepoko
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gunungpati	%	100	100	95.000.000	100	105.450.000	100	109.668.000	100	110.764.680	100	110.786.833	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					95.000.000		105.450.000		109.668.000		110.764.680		110.786.833	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	95.000.000	12	105.450.000	12	109.668.000	12	110.764.680	12	110.786.833	Kelurahan Gunungpati
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mangunsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangunsari	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Mangunsari
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pakintelan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pakintelan	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Pakintelan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Plalangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Plalangan	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Plalangan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sumurrejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sumurrejo	%	100	100	90.000.000	100	99.900.000	100	103.896.000	100	104.934.960	100	104.955.947	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					90.000.000		99.900.000		103.896.000		104.934.960		104.955.947	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	90.000.000	12	99.900.000	12	103.896.000	12	104.934.960	12	104.955.947	Kelurahan Sumurrejo
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					2.350.000.000		2.608.500.000		2.712.840.000		2.739.968.400		2.740.516.394	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	100	750.000.000	100	832.500.000	100	865.800.000	100	874.458.000	100	874.632.892	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					750.000.000		832.500.000		865.800.000		874.458.000		874.632.892	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	750.000.000	12	832.500.000	12	865.800.000	12	874.458.000	12	874.632.892	Kecamatan Gunungpati

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sukorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sukorejo	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Sukorejo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sadeng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sadeng	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Sadeng
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kandri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kandri	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Kandri
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sekaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sekaran	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Sekaran
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pongangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pongangan	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Pongangan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kalisegoro	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kalisegoro	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Kalisegoro
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatirejo	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Jatirejo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Ngijo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngijo	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Ngijo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Patemon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Patemon	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Patemon
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Nongkosawit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Nongkosawit	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Nongkosawit
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Cepoko	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cepoko	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Cepoko
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gunungpati	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Gunungpati
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangunsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangunsari	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Mangunsari
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pakintelan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pakintelan	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Pakintelan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Plalangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Plalangan	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Plalangan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sumurrejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sumurrejo	%	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	115.440.000	100	116.594.400	100	116.617.719	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100.000.000		111.000.000		115.440.000		116.594.400		116.617.719	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100.000.000	12	111.000.000	12	115.440.000	12	116.594.400	12	116.617.719	Kelurahan Sumurrejo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					28.530.503.054		29.917.960.102		30.521.845.990		30.632.771.247		30.894.420.956	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	%	89	91	28.530.503.054	92	29.917.960.102	93	30.521.845.990	94	30.632.771.247	95	30.894.420.956	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.136.363.054		10.607.348.102		10.851.855.550		10.962.280.807		11.223.430.516	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan gunungpati	Laporan	N/A	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.250	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	200.000.000	6	210.000.000	6	220.500.000	6	231.525.000	6	243.101.250	Kecamatan Gunungpati
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Gunungpati	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Gunungpati	Kegiatan	150	6	603.763.054	6	1.064.748.102	6	1.298.755.550	6	1.398.155.807	6	1.647.729.266	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					603.763.054		1.064.748.102		1.298.755.550		1.398.155.807		1.647.729.266	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	11	6	603.763.054	6	1.064.748.102	6	1.298.755.550	6	1.398.155.807	6	1.647.729.266	Kecamatan Gunungpati
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sukorejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sukorejo	Kegiatan	12	6	604.600.000	6	604.600.000	6	604.600.000	6	604.600.000	6	604.600.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					604.600.000		604.600.000		604.600.000		604.600.000		604.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	12	6	604.600.000	6	604.600.000	6	604.600.000	6	604.600.000	6	604.600.000	Kelurahan Sukorejo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sadeng	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sadeng	Kegiatan	8	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					587.800.000		587.800.000		587.800.000		587.800.000		587.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	Kelurahan Sadeng
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kandri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kandri	Kegiatan	8	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					566.800.000		566.800.000		566.800.000		566.800.000		566.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	Kelurahan Kandri

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sekaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sekaran	Kegiatan	10	6	596.200.000	6	596.200.000	6	596.200.000	6	596.200.000	6	596.200.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					596.200.000		596.200.000		596.200.000		596.200.000		596.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	6	596.200.000	6	596.200.000	6	596.200.000	6	596.200.000	6	596.200.000	Kelurahan Sekaran
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pongangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pongangan	Kegiatan	8	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	Kelurahan Pongangan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalisegoro	Kegiatan	8	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	Kelurahan Kalisegoro
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Jatirejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatirejo	Kegiatan	8	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					566.800.000		566.800.000		566.800.000		566.800.000		566.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	6	566.800.000	Kelurahan Jatirejo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Ngijo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngijo	Kegiatan	8	6	592.000.000	6	592.000.000	6	592.000.000	6	592.000.000	6	592.000.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					592.000.000		592.000.000		592.000.000		592.000.000		592.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8	6	592.000.000	6	592.000.000	6	592.000.000	6	592.000.000	6	592.000.000	Kelurahan Ngijo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Patemon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Patemon	Kegiatan	9	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					587.800.000		587.800.000		587.800.000		587.800.000		587.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	9	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	6	587.800.000	Kelurahan Patemon
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Nongkosawit	Kegiatan	9	6	587.000.000	6	587.000.000	6	587.000.000	6	587.000.000	6	587.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					587.000.000		587.000.000		587.000.000		587.000.000		587.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	9	6	587.000.000	6	587.000.000	6	587.000.000	6	587.000.000	6	587.000.000	Kelurahan Nongkosawit
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Cepoko	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Cepoko	Kegiatan	8	6	571.000.000	6	571.000.000	6	571.000.000	6	571.000.000	6	571.000.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					571.000.000		571.000.000		571.000.000		571.000.000		571.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8	6	571.000.000	6	571.000.000	6	571.000.000	6	571.000.000	6	571.000.000	Kelurahan Cepoko
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Gunungpati	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gunungpati	Kegiatan	7	6	600.400.000	6	600.400.000	6	600.400.000	6	600.400.000	6	600.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					600.400.000		600.400.000		600.400.000		600.400.000		600.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	6	600.400.000	6	600.400.000	6	600.400.000	6	600.400.000	6	600.400.000	Kelurahan Gunungpati
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mangunsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mangunsari	Kegiatan	11	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	11	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	Kelurahan Mangunsari
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pakintelan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pakintelan	Kegiatan	10	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	Kelurahan Pakintelan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Plalangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Plalangan	Kegiatan	8	6	575.200.000	6	575.200.000	6	575.200.000	6	575.200.000	6	575.200.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					575.200.000		575.200.000		575.200.000		575.200.000		575.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8	6	575.200.000	6	575.200.000	6	575.200.000	6	575.200.000	6	575.200.000	Kelurahan Plalangan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sumurrejo	Kegiatan	10	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000		579.400.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	6	579.400.000	Kelurahan Sumurrejo
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					18.394.140.000		19.310.612.000		19.669.990.440		19.670.490.440		19.670.990.440	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gunungpati	Laporan	4	1	127.000.000	1	127.000.000	1	127.000.000	1	127.000.000	1	127.000.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	127.000.000	4	127.000.000	4	127.000.000	4	127.000.000	4	127.000.000	Kecamatan Gunungpati
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sukorejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sukorejo	Laporan	9	1	2.752.880.000	1	2.890.524.000	1	2.948.334.480	1	2.948.334.480	1	2.948.334.480	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					2.752.880.000		2.890.524.000		2.948.334.480		2.948.334.480		2.948.334.480	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	2.752.880.000	6	2.890.524.000	6	2.948.334.480	6	2.948.334.480	6	2.948.334.480	Kelurahan Sukorejo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sadeng	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sadeng	Laporan	9	1	1.740.160.000	1	1.827.168.000	1	1.863.711.360	1	1.863.711.360	1	1.863.711.360	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					1.740.160.000		1.827.168.000		1.863.711.360		1.863.711.360		1.863.711.360	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	1.740.160.000	6	1.827.168.000	6	1.863.711.360	6	1.863.711.360	6	1.863.711.360	Kelurahan Sadeng
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kandri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kandri	Laporan	9	1	901.000.000	1	946.050.000	1	964.971.000	1	964.971.000	1	964.971.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					901.000.000		946.050.000		964.971.000		964.971.000		964.971.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	901.000.000	6	946.050.000	6	964.971.000	6	964.971.000	6	964.971.000	Kelurahan Kandri
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sekaran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sekaran	Laporan	9	1	1.159.320.000	1	1.217.286.000	1	1.241.631.720	1	1.241.631.720	1	1.241.631.720	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					1.159.320.000		1.217.286.000		1.241.631.720		1.241.631.720		1.241.631.720	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	1.159.320.000	6	1.217.286.000	6	1.241.631.720	6	1.241.631.720	6	1.241.631.720	Kelurahan Sekaran
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pongangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang	Laporan	9	1	967.560.000	1	1.015.938.000	1	1.036.256.760	1	1.036.256.760	1	1.036.256.760	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	seharusnya di Kelurahan Pongangan													
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					967.560.000		1.015.938.000		1.036.256.760		1.036.256.760		1.036.256.760	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	967.560.000	6	1.015.938.000	6	1.036.256.760	6	1.036.256.760	6	1.036.256.760	Kelurahan Pongangan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalisegoro	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalisegoro	Laporan	9	1	842.360.000	1	884.478.000	1	902.167.560	1	902.167.560	1	902.167.560	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					842.360.000		884.478.000		902.167.560		902.167.560		902.167.560	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	842.360.000	6	884.478.000	6	902.167.560	6	902.167.560	6	902.167.560	Kelurahan Kalisegoro
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatirejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatirejo	Laporan	9	1	549.160.000	1	576.618.000	1	588.150.360	1	588.150.360	1	588.150.360	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					549.160.000		576.618.000		588.150.360		588.150.360		588.150.360	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	549.160.000	6	576.618.000	6	588.150.360	6	588.150.360	6	588.150.360	Kelurahan Jatirejo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngijo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngijo	Laporan	9	1	842.360.000	1	884.478.000	1	902.167.560	1	902.167.560	1	902.167.560	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					842.360.000		884.478.000		902.167.560		902.167.560		902.167.560	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	842.360.000	6	884.478.000	6	902.167.560	6	902.167.560	6	902.167.560	Kelurahan Ngijo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Patemon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Patemon	Laporan	9	1	1.263.120.000	1	1.326.276.000	1	1.352.801.520	1	1.352.801.520	1	1.352.801.520	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					1.263.120.000		1.326.276.000		1.352.801.520		1.352.801.520		1.352.801.520	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	1.263.120.000	6	1.326.276.000	6	1.352.801.520	6	1.352.801.520	6	1.352.801.520	Kelurahan Patemon
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Nongkosawit	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Nongkosawit	Laporan	9	1	938.240.000	1	985.152.000	1	1.004.855.040	1	1.004.855.040	1	1.004.855.040	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					938.240.000		985.152.000		1.004.855.040		1.004.855.040		1.004.855.040	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	938.240.000	6	985.152.000	6	1.004.855.040	6	1.004.855.040	6	1.004.855.040	Kelurahan Nongkosawit

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cepoko	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cepoko	Laporan	9	1	629.200.000	1	660.660.000	1	673.873.200	1	673.873.200	1	673.873.200	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					629.200.000		660.660.000		673.873.200		673.873.200		673.873.200	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	629.200.000	6	660.660.000	6	673.873.200	6	673.873.200	6	673.873.200	Kelurahan Cepoko
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gunungpati	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gunungpati	Laporan	9	1	1.505.600.000	1	1.580.880.000	1	1.612.497.600	1	1.612.497.600	1	1.612.497.600	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					1.505.600.000		1.580.880.000		1.612.497.600		1.612.497.600		1.612.497.600	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	1.505.600.000	6	1.580.880.000	6	1.612.497.600	6	1.612.497.600	6	1.612.497.600	Kelurahan Gunungpati
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mangunsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangunsari	Laporan	9	1	1.084.840.000	1	1.139.082.000	1	1.161.863.640	1	1.161.863.640	1	1.161.863.640	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					1.084.840.000		1.139.082.000		1.161.863.640		1.161.863.640		1.161.863.640	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	1.084.840.000	6	1.139.082.000	6	1.161.863.640	6	1.161.863.640	6	1.161.863.640	Kelurahan Mangunsari
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pakintelan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pakintelan	Laporan	9	1	916.840.000	1	962.682.000	1	981.935.640	1	981.935.640	1	981.935.640	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					916.840.000		962.682.000		981.935.640		981.935.640		981.935.640	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	916.840.000	6	962.682.000	6	981.935.640	6	981.935.640	6	981.935.640	Kelurahan Pakintelan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Plalangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Plalangan	Laporan	9	1	740.920.000	1	777.966.000	1	793.525.320	1	793.525.320	1	793.525.320	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					740.920.000		777.966.000		793.525.320		793.525.320		793.525.320	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	740.920.000	6	777.966.000	6	793.525.320	6	793.525.320	6	793.525.320	Kelurahan Plalangan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sumurrejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sumurrejo	Laporan	9	1	1.122.080.000	1	1.178.184.000	1	1.201.747.680	1	1.201.747.680	1	1.201.747.680	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					1.122.080.000		1.178.184.000		1.201.747.680		1.201.747.680		1.201.747.680	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	1.122.080.000	6	1.178.184.000	6	1.201.747.680	6	1.201.747.680	6	1.201.747.680	Kelurahan Sumurrejo
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	%	N/A	100	11.500.000	100	12.190.000	100	12.500.000	100	13.000.000	100	13.500.000	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					11.500.000		12.190.000		12.500.000		13.000.000		13.500.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	11.500.000	1	12.190.000	1	12.500.000	1	13.000.000	1	13.500.000	Kecamatan Gunungpati
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	%	N/A	100	300.000.000	100	318.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					300.000.000		318.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	12	300.000.000	12	318.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	Kecamatan Gunungpati
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					111.607.197		123.414.750		128.553.947		129.497.944		131.724.639	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati	%	100	100	111.607.197	100	123.414.750	100	128.553.947	100	129.497.944	100	131.724.639	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					111.607.197		123.414.750		128.553.947		129.497.944		131.724.639	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kegiatan	N/A	4	111.607.197	4	123.414.750	4	128.553.947	4	129.497.944	4	131.724.639	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					111.607.197		123.414.750		128.553.947		129.497.944		131.724.639	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	4	111.607.197	4	123.414.750	4	128.553.947	4	129.497.944	4	131.724.639	Kecamatan Gunungpati
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					114.691.043		126.824.854		132.106.053		133.076.135		135.364.355	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati	%	80	82	114.691.043	84	126.824.854	86	132.106.053	88	133.076.135	90	135.364.355	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					114.691.043		126.824.854		132.106.053		133.076.135		135.364.355	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Kegiatan	2	4	114.691.043	4	126.824.854	4	132.106.053	4	133.076.135	4	135.364.355	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ketahanan Nasional di Kecamatan													
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					114.691.043		126.824.854		132.106.053		133.076.135		135.364.355	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100	200	114.691.043	200	126.824.854	200	132.106.053	200	133.076.135	200	135.364.355	Kecamatan Gunungpati

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

Rencana Pendapatan di Kecamatan Gunungpati Tahun 2026 – 2030, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan di Kecamatan Gunungpati Tahun 2026 – 2030

URAIAN PENDAPATAN	BASELINE 2024	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Retribusi Daerah	3.000.000	3.210.000	3.434.700	3.675.129	3.932.388	4.207.655	4.502.191
Retribusi Jasa Usaha	3.000.000	3.210.000	3.434.700	3.675.129	3.932.388	4.207.655	4.502.191
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.000.000	3.210.000	3.434.700	3.675.129	3.932.388	4.207.655	4.502.191

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

1.10. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Gunungpati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

TUJUAN/SASARAN	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan : **Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati**									
	Indikator Tujuan 1 :								
	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gunungpati	Angka	95	96,79	96,8	96,81	96,82	96,83	
Sasaran 1 : **Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan Gunungpati**									
	Indikator Sasaran 1								
	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan Gunungpati	Persen	88%	90%	92%	94%	96%	98%	
	Indikator Tujuan 2 :								
	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan Gunungpati	Nilai	78	80	81	82	83	84	
Sasaran 2 : **Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati**									
	Indikator Sasaran 3								
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati	Angka	78	80	82	84	86	88	

Sumber: Kecamatan Gunungpati 2025

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci pada Kecamatan Gunungpati sesuai RPJMD Kota Semarang 2025 - 2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Gunungpati
Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2025 - 2029

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Gunungpati Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Gunungpati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan penjunjang kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Gunungpati. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Gunungpati ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Gunungpati.

Permasalahan kelembagaan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Gunungpati. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Gunungpati.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga Kota Semarang.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Gunungpati. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Gunungpati sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

42. KECAMATAN TUGU

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Semarang maka Kecamatan Tugu wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang kewilayahan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Kecamatan Tugu.

Gambar 0.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

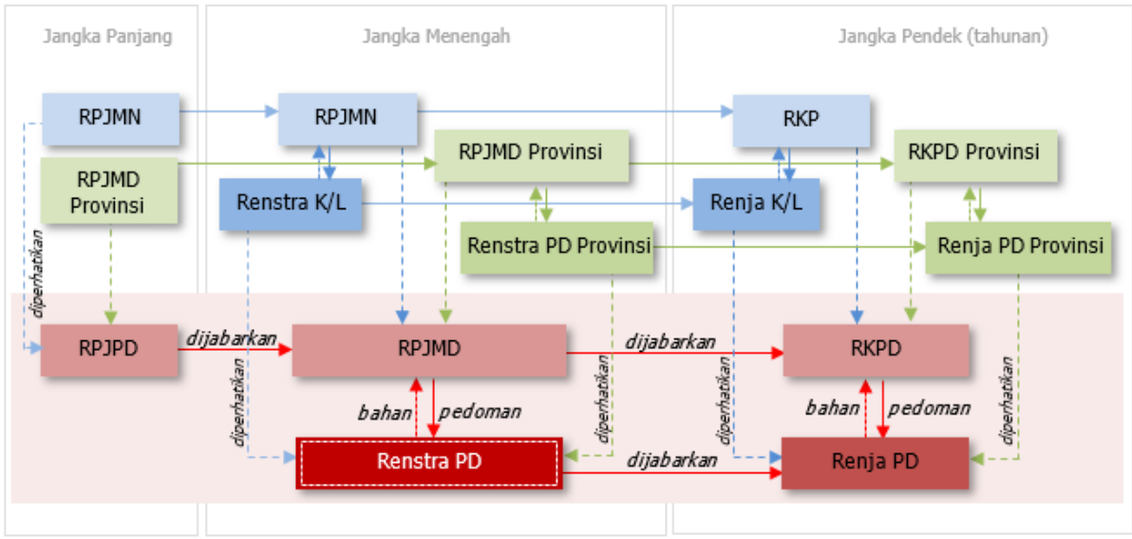

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60) ;
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
28. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 37);
29. Keputusan Camat Tugu Kota Semarang Nomor 900.1/89 Tahun 2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Tugu adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tugu adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tugu, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tugu. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Tugu yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tugu mempunyai luas sebesar 3.133,3 Ha yang mencakup 7 (tujuh) kelurahan, adapun 7 kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Jerakah dengan luas wilayah 153,42 Ha; Kelurahan Tugurejo dengan luas wilayah 715,90 Ha; Kelurahan Karanganyar luas wilayah 426,56 Ha; Kelurahan Randugarut dengan luas wilayah 483,79 Ha; Kelurahan Mangkang Wetan dengan luas wilayah 346,51 Ha; Kelurahan Mangunharjo luas wilayah 482,37 Ha; dan Kelurahan Mangkang Kulon dengan luas wilayah 524,78 Ha. Dengan batas wilayah Kecamatan Tugu meliputi :

Sebelah utara : Laut Jawa
Sebelah selatan : Kecamatan Ngaliyan
Sebelah timur : Kecamatan Semarang Barat
Sebelah barat : Kabupaten Kendal

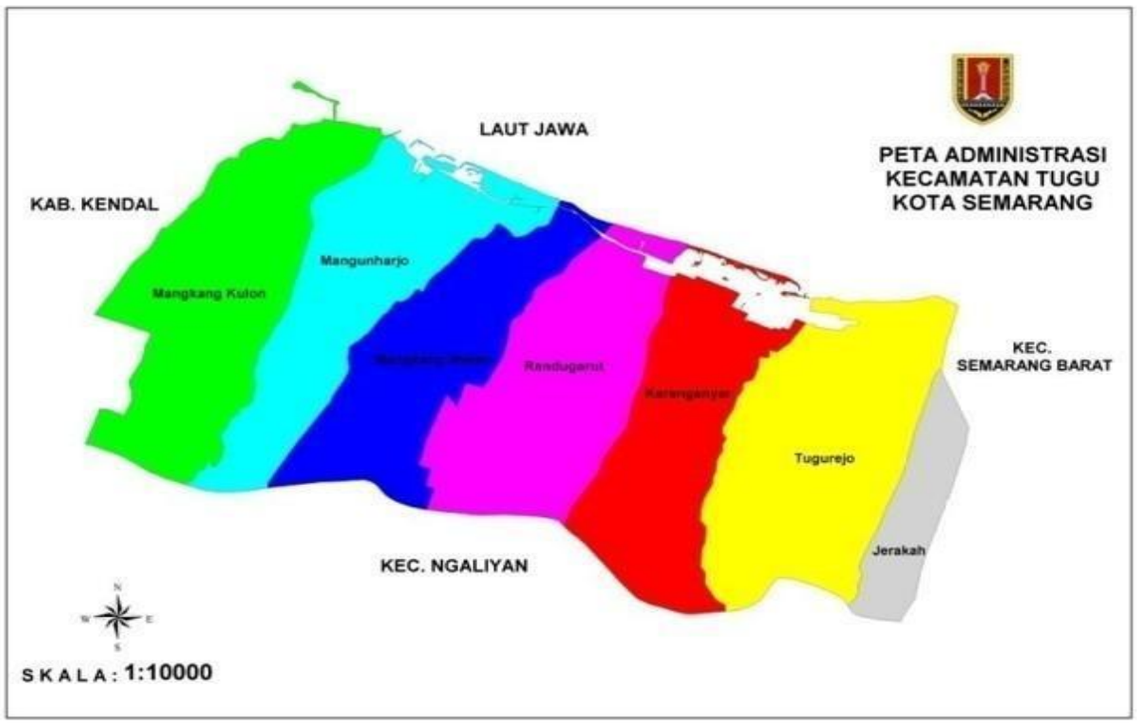

Peta Wilayah Kecamatan Tugu

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Tugu bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; dimana disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas

membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Tugu menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
9. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
11. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
12. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
13. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
14. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tugu telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi kecamatan sebagai berikut:

1. Camat;
   Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Sekretariat;
   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi

Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Sekretariat terdiri atas :

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Seksi Pemerintahan;
   Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.
4. Seksi Pembangunan;
   Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
   Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
6. Seksi Pelayanan Publik;
   Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.
8. Kelurahan terdiri atas :
   1) Lurah;
      Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
   2) Sekretariat Kelurahan;
      Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian

dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

3) Seksi Pembangunan Kelurahan;
   Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.
4) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
   Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.
5) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan

9. Jabatan Fungsional
   Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang. Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Kecamatan Tugu Kota Semarang dapat diihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Tugu Kota Semarang

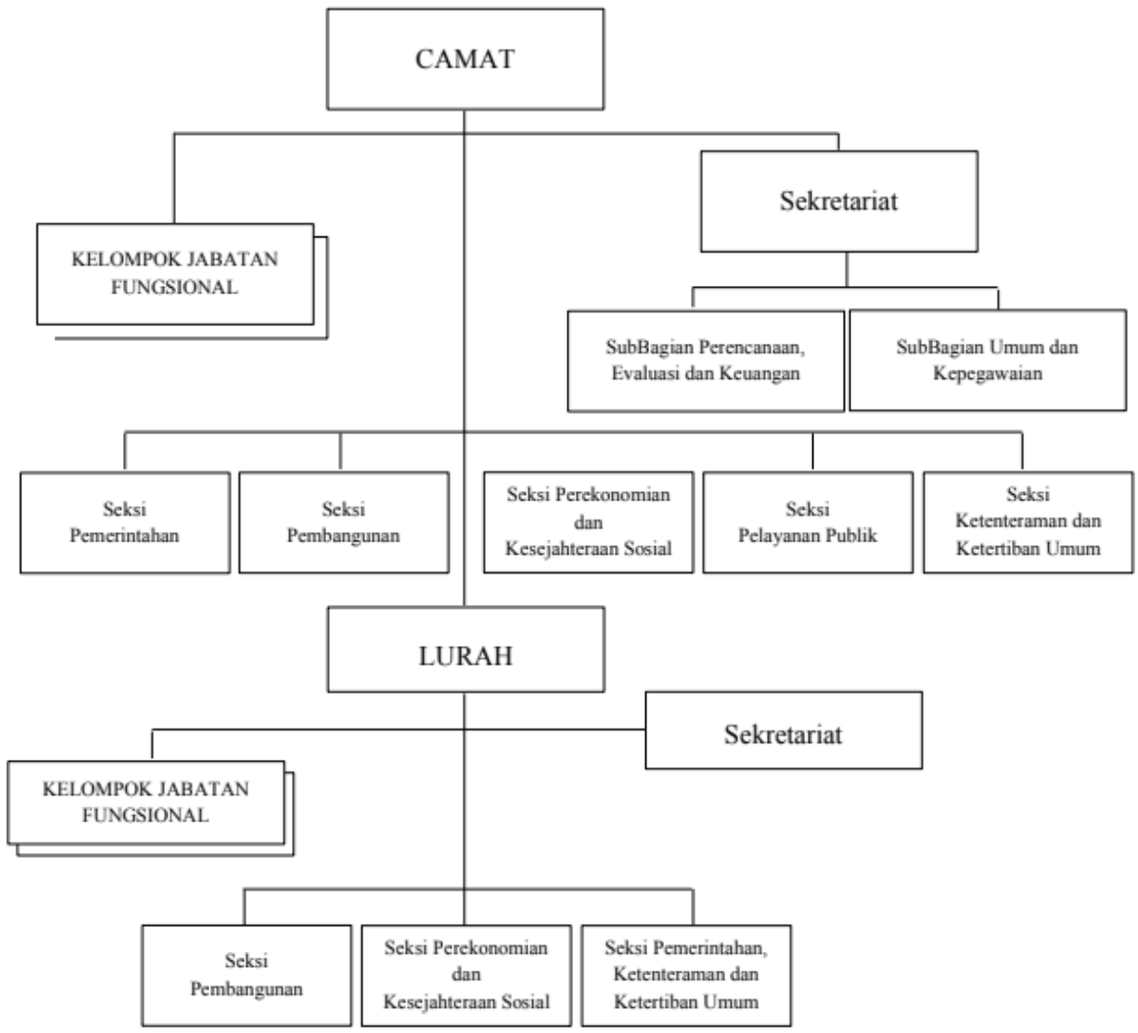

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Tugu

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Tugu adalah sebagai berikut:

1. Camat

   Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

   a. perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
   b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
   c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;

d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
e. penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
f. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
g. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
h. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
j. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
k. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
l. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
m. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
n. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
o. penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
p. penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
q. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
r. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
s. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

a. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
d. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
g. pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
h. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
i. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
j. pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
m. pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
o. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
q. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
r. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
s. pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
t. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
u. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
v. pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;
w. pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
x. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan

listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;

y. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
z. pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
å. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
ä. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
ö. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
aa. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
f. menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
g. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
l. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
m. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;

q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
u. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
v. menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
w. menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
x. menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
y. menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
z. menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
å. menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
ä. menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
ö. menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
aa. menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
bb. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
cc. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
dd. menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
ee. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
ii. menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;

gg. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
hh. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
ii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
jj. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
kk. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
ll. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
mm. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
f. menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
g. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
h. menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
j. menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
k. menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
n. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
p. menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
q. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
r. menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat

ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, *Water Closet* umum, terminal);

t. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
w. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
x. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
y. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
z. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
å. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
ä. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
ö. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
aa. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
bb. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
cc. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
g. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
h. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;

k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
m. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
n. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
u. menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
v. menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
w. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
x. menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
y. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
z. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
å. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
ä. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
ö. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
aa. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;

bb. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
cc. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
dd. menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
ee. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
ff. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
gg. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
ii. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
jj. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
kk. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
ll. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
mm. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
nn. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pelayanan Publik
Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
f. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
h. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;

j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
k. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
l. menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
m. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
n. menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
o. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
p. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
q. menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
r. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
s. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
t. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
v. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
å. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

g. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
k. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
l. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
t. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
v. menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
w. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
x. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
y. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
z. menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
å. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara

Republik , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

ä. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;

ö. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;

aa. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan

bb. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;

cc. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan

dd. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;

ee. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;

ff. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;

gg. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

hh. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

ii. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

jj. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

kk. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

ll. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kasubagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya

c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;

d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

f. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;

g. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

h. menyiapkan kegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
i. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan fasilitasi kunjungan tamu di Kecamatan;
j. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
k. menyiapkan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
l. menyiapkan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
m. menyiapkan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dan penyediaan bahan/material serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
n. menyiapkan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
o. menyiapkan kegiatan pengadaan mebel, dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
p. menyiapkan kegiatan pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tak berwujud, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
q. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
r. menyiapkan kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya, pemeliharaan aset tak berwujud, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
s. menyiapkan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Kecamatan;
t. menyiapkan kegiatan pengamanan barang milik daerah Kecamatan;
u. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
v. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
w. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan Budaya Kerja Kecamatan;
x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan Zona Integritas;
y. menyiapkan kegiatan pengembangan inovasi Kecamatan;
z. menyiapkan kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;

å. menyiapkan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Kecamatan;
ä. menyiapkan kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Kecamatan;
ö. menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian Kecamatan;
aa. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Kecamatan;
bb. menyiapkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan bagi pegawai Kecamatan;
cc. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
dd. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
ee. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
ff. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
jj. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
kk. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
ii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

9. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
f. menyiapkan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, antara lain: Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
g. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan, Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
h. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan;
l. menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Kecamatan;

m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
n. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan;
o. menyiapkan kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
q. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Kecamatan;
r. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah Kecamatan; menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Kecamatan;
s. menyiapkan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Kecamatan;
t. menyiapkan kegiatan pengelolaan, penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Kecamatan;
u. menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Kecamatan;
v. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kecamatan;
w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
x. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran Kecamatan;
y. menyiapkan kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Kecamatan;
z. menyiapkan kegiatan penyusunan manajemen resiko dan rencana tindak pengendalian;
å. menyiapkan kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
ä. menyiapkan kegiatan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
ö. menyiapkan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
aa. menyiapkan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
bb. menyiapkan kegiatan pengolahan data retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
cc. menyiapkan kegiatan penetapan wajib retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
dd. menyiapkan kegiatan pelaporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
hh. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
ii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
gg. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
hh. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

ii. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
jj. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Lurah

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan;
j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan;
k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan;
l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan;
m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;
n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan
o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Sekretaris Kelurahan

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat;
b. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

c. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kesekretariatan Kelurahan;
f. pelaksanaan administrasi keuangan Kelurahan;
g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kelurahan;
h. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan barang milik daerah Kelurahan;
i. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kelurahan;
j. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Kelurahan;
l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kelurahan;
m. pelaksanaan administrasi umum Kelurahan;
n. pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kelurahan;
o. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kelurahan;
p. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kelurahan;
q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan di lingkungan Kelurahan;
r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kelurahan;
s. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kelurahan;
t. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan;
v. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
w. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
x. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
y. menyiapkan kegiatan pengelolaan survei kepuasan masyarakat/pelanggan;
z. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
aa. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

ä. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sekretariat;
ö. menyiapkan fasilitasi konsep kebijakan dan kegiatan pelayanan publik;
aa. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
bb. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
cc. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
dd. menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
ee. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
ff. menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
gg. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kelurahan;
hh. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan;
ii. menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
jj. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan;
kk. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
ll. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
mm. menyiapkan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat;
nn. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
oo. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
pp. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
qq. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan
Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;

f. menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
g. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
h. menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan;
i. menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
j. menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
k. menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
n. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
p. menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
q. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
r. menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
t. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
w. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
x. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
y. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
z. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
å. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
ä. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
ö. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;

aa. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
bb. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
cc. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan
Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
g. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
h. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
l. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan Karang Taruna;
m. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
n. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;

u. menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan;
v. menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
w. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
x. menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
y. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
y. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
z. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
å. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
ä. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
ö. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
aa. menyiapkan kegiatan pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
bb. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga;
cc. menyiapkan kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
dd. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
ee. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
ff. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
gg. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
hh. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Sosial, Pangan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi dan Usaha Mikro, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
ii. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;

jj. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
kk. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
ll. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
mm. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
nn. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
f. menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
g. menyiapkan kegiatan administrasi dan fasilitasi di bidang pertanahan;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kelurahan baik statis maupun dinamis;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kelurahan;
l. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
m. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;

s. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
t. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan;
u. peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
v. menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
w. menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
x. menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
y. menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
z. menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
å. menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
ä. menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
ö. menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
aa. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
bb. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
cc. menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Wali Kota;
dd. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
ee. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
ff. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
gg. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
ii. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

jj. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
kk. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
ll. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
mm. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
nn. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
oo. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
pp. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
qq. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
rr. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
ss. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
tt. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
uu. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
vv. menyiapkan kegiatan program pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
ww. menyiapkan kegiatan penelitian/pengamatan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku;
xx. menyiapkan kegiatan pertimbangan legalitas dan izin keramaian yang berhubungan dengan ketertiban umum serta kemasyarakatan;
yy. menyiapkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang menyangkut ketertiban wilayah;
åå. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam mentaati peraturan;
ää. menyiapkan bahan dan melaksanakan menyelenggarakan perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan;
öö. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penanggulangan akibat bencana;
aaa. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan anggota linmas dan membuat laporan anggota linmas;
bbb. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat dan pos keamanan lingkungan;
ccc. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pemasangan bendera dan umbul-umbul;

ddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak remaja d an penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat addiktif dan bahan berbahaya;
eee. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
fff. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
ggg. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
hhh. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
iii. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
jjj. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Tugu

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Desember 2024 jumlah ASN sebanyak 71 pegawai. Sumberdaya manusia pada Kecamatan Tugu di klasifikasikan ke dalam. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Tugu Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD			1		1
1	SMP Sederajat					0
2	SMA Sederajat	3	1	13	1	18
3	D3		3	2	2	7
4	S1	22	7	5	5	39
5	S2	2	4			6
6	S3					0

Jumlah pegawai ASN kecamatan Tugu sebanyak 42 pegawai, terdiri dari 41 orang PNS dan 1 orang PPPK. Dari 42 pegawai ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Tugu Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	2	5
2	Golongan III	23	10	33
3	Golongan IV	1	3	4

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Tugu berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Kecamatan Tugu

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
	KECAMATAN TUGU										
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4100	1993	Jl. Walisongo Km 10 Semarang	Hak Pakai	07/12/2023	HP. 214	Kantor Kecamatan Tugu	Ex-Bengkok	3.874.500.000	
2	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	24307	2015	Jl. Tugurejo RW. 01	Sertipikat	22/12/2015	NO : 892,893,894	Makam Warga Graha Padma	Hibah	875.052.000	Hibah dari Graha Padma untuk Makam
	KELURAHAN JERAKAH										
1	Bekas Sawah/Rawa	1800	1945	Jl. Stasiun RW. 03		Belum HP	_	Didirikan Rumah Warga sebanyak 18 rumah	Ex-Bengkok	621.400.000	
2	Bekas Sawah/Rawa	8041	1945	Jl. Stasiun RW. 02	Hak Pakai	24/08/2007	HP 3	Untuk Lapangan Sepak Bola	Ex-Bengkok	1.997.400.000	Untuk Lapangan Sepak Bola
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5002	1945	Jl. Stasiun RW. 03	Hak Pakai	24/08/2007	HP 2	Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan	Ex-Bengkok	1.802.000.000	
	KELURAHAN KARANGANYAR										
1	Makam Umum/Kuburan Umum	7409	1945	Jl. Pantura RT.06 RW. 03	Hak Pakai	06/01/1998	HP. 19	Makam	Wakaf	1.481.800.000	Makam Warga
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	1996	RT. 08 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 13	Kantor dan Balai	Hibah	52.500.000	
3	Tanah kosong yang tidak diusahakan	22626	1945	RT. 08 RW. 01	Hak Pakai	24/08/2007	HP 16	Darat	Ex-Bengkok	346.800.000	
4	Tanah Sawah	18233	1945	RT. 08 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 15	Sawah	Ex-Bengkok	1.530.000.000	

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
5	Tanah Sawah	20209	1945	RT. 08 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 17	Sawah	Ex-Bengkok	658.750.000	
6	Tanah Sawah	7713	1945	RT. 08 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 12	Sawah	Ex-Bengkok	268.600.000	
7	Tanah Sawah	2401	1945	RT. 01 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 14	Tanah Sawah	Ex-Bengkok	134.400.000	
8	Tanah Sawah	3055	1945	RT. 01 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 8	Sawah	Ex-Bengkok	105.400.000	
9	Tanah Lapangan Sepak Bola	8726	2001	RT. 01 RW. 01	Hak Pakai	24/08/2007	HP 18	Lapangan Olah Raga	SebagaianTukar guling (Kumaidi)	61.200.000	
	KELURAHAN TUGUREJO										
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2500	1945	RT. 07 RW. 05	Hak Pakai	28/04/2020	HP. 061	Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan	Ex-Bengkok	1.802.000.000	
2	Hutan Cadangan	4071	1976	RT. 06 RW. 05	Hak Pakai	26/07/2007	HP 18	Hutan Kota	Ex-Bengkok	281.600.000	Kampung Tematik Gerbang Elok
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	382	1976	RT. 01 RW. 03	Hak Pakai	23/08/2007	HP 38	BPR/BKK Kec Tugu	Ex-Bengkok	41.200.000	
4	Tanah Bangunan Balai Nikah	621	1976	RT. 01 RW. 03	Hak Pakai	23/08/2007	HP 39	Kantor KUA Kec Tugu	Ex-Bengkok	51.500.000	
5	Tanah kosong yang tidak diusahakan	500	2013	RT. 08 RW. 01	Hak Pakai	07/12/2023	HP. 216	Gedung Pertemuan	Ex-Bengkok	129.600.000	
6	Tanah Sawah	5860	1976	RT. 02 RW. 04	Hak Pakai	26/07/2007	HP 19	Sawah	Ex-Bengkok	307.200.000	
7	Tanah Sawah	3324	1976	RT. 03 RW. 04	Hak Pakai	08/07/2007	HP 31	Sawah	Ex-Bengkok	237.600.000	
8	Tanah Sawah	3106	1976	RT. 03 RW. 04	Hak Pakai	08/07/2007	HP 30	Sawah	Ex-Bengkok	170.400.000	

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
9	Tanah Sawah	1364	1976	RT. 06 RW. 03	Hak Pakai	08/07/2007	HP 27	Sawah	Ex-Bengkok	168.100.000	
10	Tanah Sawah	2434	1976	RT. 06 RW. 03	Hak Pakai	08/07/2007	HP 35	Sawah	Ex-Bengkok	110.400.000	
11	Tanah Sawah	3154	1976	RT. 06 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 14	Sawah	Ex-Bengkok	148.800.000	
12	Tanah Sawah	9282	1976	RT. 06 RW. 03	Hak Pakai	07/08/2007	HP 24	Sawah	Ex-Bengkok	381.600.000	
13	Tanah Sawah	1261	1976	RT. 06 RW. 03	Hak Pakai	07/08/2007	HP 23	Sawah	Ex-Bengkok	24.000.000	
14	Tanah Sawah	3796	1976	RT. 06 RW. 03	Hak Pakai	07/08/2007	HP 32	Sawah	Ex-Bengkok	180.000.000	
15	Tanah Sawah	3554	1976	RT. 06 RW. 03	Hak Pakai	07/08/2007	HP 34	Sawah	Ex-Bengkok	170.400.000	
16	Tanah Sawah	3379	1976	RT. 06 RW. 03	Hak Pakai	07/08/2007	HP 33	Sawah	Ex-Bengkok	156.000.000	
17	Tanah Sawah	10200	2011	RT. 01 RW. 04	Hak Pakai	26/07/2007	HP 17	Sawah	Ex-Bengkok	163.440.000	
18	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	1766	1976	RT. 01 RW. 03	Hak Pakai	23/08/2007	HP 40	Rencana Perkantoran	Ex-Bengkok	334.750.000	Makam Warga
19	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	9763	1976	RT. 01 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 13	Rencana Perkantoran	Ex-Bengkok	947.909.000	Perluasan Kantor DLH, UPTD dan Disdalduk
20	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	2015	1976	RT. 01 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 15	Rencana Perkantoran	Ex-Bengkok	206.515.000	Sebagaian untuk sarana Olah Raga
21	Tanah Lapangan Sepak Bola	9168	1976	RT. 01 RW. 03	Hak Pakai	28/12/2007	HP 42	Lapangan Sepak Bola RW III	Ex-Bengkok	871.450.000	
22	Tanah Lapangan Sepak Bola	5802	2013	RT. 01 RW. 03	Hak Pakai	07/12/2023	HP. 0215	Lapangan sepak Bola	Ex-Bengkok	961.350.000	

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
23	Lain-lain	1400	2001	RT. 08 RW. 01	Hak Pakai	-	Belum HP	Didirikan Rumah Warga sebanyak 35 rumah	Ex-Bengkok	280.000.000	
	KELURAHAN MANGKANG WETAN										
1	Tambak	36775	2009	RT. 06 RW. 07		-	Belum HP	Tambak	Ex-Bengkok	552.600.000	Abrasi (sudah Jadi Lautan)
2	Tanah Sawah	79574	2009	RT. 03 RW. 03		-	Belum HP	sawah	Ex-Bengkok	2.793.600.000	
3	Tanah Sawah	11878	2009	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 16	sawah	Ex-Bengkok	352.200.000	
4	Tambak	24001	2009	RT. 06 RW. 07		-	Belum HP	Tambak	Ex-Bengkok	1.215.700.000	Abrasi (sudah Jadi Lautan)
5	Tanah Sawah	41082	2014	RT. 03 RW. 03		-	Belum HP	Pertanian	Ex-Bengkok	3.697.380.000	
6	Tanah Sawah	2560	2014	RT. 03 RW. 03		-	Belum HP	Sawah	Ex-Bengkok	230.400.000	
7	Tanah Sawah	6409	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 23	Sawah	Ex-Bengkok	1.413.125.000	
8	Tanah Sawah	12678	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 24	Sawah	Ex-Bengkok	457.400.000	
9	Tanah Sawah	15474	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 28	Sawah	Ex-Bengkok	1.893.375.000	
10	Tanah Sawah	5513	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 25	Sawah	Ex-Bengkok	9.300.000	
11	Tanah Sawah	1735	1945	RT. 02 RW. 04	Hak Pakai	26/07/2007	HP 8	Sawah	Ex-Bengkok	23.300.000	
12	Tanah Sawah	10172	1945	RT. 06 RW. 02	Hak Pakai	26/07/2007	HP 13	Sawah	Ex-Bengkok	318.200.000	
13	Tanah Sawah	11321	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 7	Sawah	Ex-Bengkok	327.600.000	

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
14	Tanah Sawah	1157	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	05/12/2023	HP. 146 HP. 145	Untuk Tempat Ibadah Musholla , MCK umum dan Jalan	Ex-Bengkok	40.600.000	
15	Tanah Sawah	14091	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 14	Sawah	Ex-Bengkok	428.100.000	
16	Tanah Sawah	9615	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 15	Sawah	Ex-Bengkok	270.200.000	
17	Tanah Sawah	5262	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 9	Sawah	Ex-Bengkok	165.400.000	
18	Tanah Sawah	3467	1945	RT. 01 RW. 05	Hak Pakai	26/07/2007	HP 6	Sawah	Ex-Bengkok	214.800.000	
19	Tanah Sawah	6706	1945	RT. 01 RW. 05	Hak Pakai	26/07/2007	HP 22	sawah	Ex-Bengkok	116.600.000	
20	Tanah Sawah	8692	1945	RT. 02 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 17	Sawah	Ex-Bengkok	254.800.000	
21	Tanah Sawah	3112	1945	RT. 02 RW. 03	Hak Pakai	23/08/2007	HP 27	Sawah	Ex-Bengkok	79.000.000	
22	Tanah Sawah	3570	1945	RT. 02 RW. 03	Hak Pakai	23/08/2007	HP 26	Sawah	Ex-Bengkok	118.400.000	
23	Tanah Sawah	1506	1945	RT. 01 RW. 05	Hak Pakai	26/07/2007	HP 11	Sawah	Ex-Bengkok	46.400.000	
24	Tanah Sawah	4281	1945	RT. 01 RW. 05	Hak Pakai	26/07/2007	HP 18	Sawah	Ex-Bengkok	136.800.000	
25	Tanah Sawah	110	1945	RT. 01 RW. 05	Hak Pakai	26/07/2007	HP 19	sawah	Ex-Bengkok	3.800.000	
26	Tanah Sawah	2682	1945	RT. 01 RW. 05	Hak Pakai	26/07/2007	HP 5	Sawah	Ex-Bengkok	85.800.000	
27	Tanah Sawah	5810	2009	RT. 01 RW. 05	Hak Pakai	26/07/2007	HP 10	sawah	Ex-Bengkok	184.300.000	

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
28	Tanah Lapangan Sepak Bola	13300	2013	RW. 06		-	Belum HP	Lapangan Olah Raga Ngebruk	Tukarguling (H. ISBAT)	1.566.135.000	
29	Tanah Lapangan Sepak Bola	7761	1945	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	26/07/2007	HP 20	sawah	Ex-Bengkok	250.100.000	
30	Tambak	34247	1945	RT. 06 RW. 07		-	Belum HP	Tambak	Ex-Bengkok	514.600.000	Abrasi (sudah Jadi Lautan)
31	Tanah Lapangan Sepak Bola	17592	2013	RT. 03 RW. 03	Hak Pakai	05/12/2023	HP. 144	Lapangan Olah Raga Kalisasak	Ex-Bengkok	2.814.720.000	
	KELURAHAN MANGKANG KULON										
1	Tambak	12312	1945	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	06/05/2007	HP 15	Tambak Ikan	Ex-Bengkok	270.000.000	Abrasi (sudah Jadi Lautan)
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12312	2011	RT. 05 RW. 04	Hak Pakai	16/04/2011	HP 3	Kantor, Balai, Rumdin, Lapangan	Ex-Bengkok	5.230.200.000	
3	Tanah Sawah	2967	1945	RT. 01 RW. 02	Hak Pakai	05/07/2007	HP 13	Sawah	Ex-Bengkok	177.606.000	
4	Tanah Sawah	19943	1945	RT. 01 RW. 02	Hak Pakai	30/04/2007	HP 20	Sawah	Ex-Bengkok	538.461.000	
5	Tanah Sawah	56548	1945	RT. 01 RW. 01	Hak Pakai	24/08/2007	HP 24	Sawah	Ex-Bengkok	1.580.796.000	
6	Tanah Sawah	7966	1945	RT. 01 RW. 02	Hak Pakai	30/04/2007	HP 19	Sawah	Ex-Bengkok	215.082.000	
7	Tanah Sawah	7791	1945	RT. 01 RW. 02	Hak Pakai	06/05/2007	HP 14	Sawah	Ex-Bengkok	210.357.000	
8	Tanah Sawah	13013	1945	RT. 01 RW. 02	Hak Pakai	30/04/2007	HP 18	Sawah	Ex-Bengkok	351.351.000	
9	Tanah Sawah	4558	1945	RW. 06	Hak Pakai	04/12/2023	HP. 0079	Sawah	Ex-Bengkok	340.254.000	
10	Tanah Sawah	13010	1945	RT. 01 RW. 02	Hak Pakai	30/04/2007	HP 17	Sawah	Ex-Bengkok	351.270.000	

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
11	Tanah Sawah	8875	1945	RT. 01 RW. 02	Hak Pakai	06/05/2007	HP 16	Sawah	Ex-Bengkok	239.625.000	
12	Tanah Sawah	46968	1945	RT. 01 RW. 02	Hak Pakai	24/08/2007	HP 25	Sawah	Ex-Bengkok	1.268.136.000	
13	Tanah Sawah	42434	1945	RT. 01 RW. 02	Hak Pakai	24/08/2007	HP 23	Sawah	Ex-Bengkok	1.145.718.000	
	KELURAHAN MANGUNHARJO										
1	Tambak	25687	1976	RT. 01 RW. 01	Hak Pakai	12/09/2007	HP 32	Tambak Ikan	Ex-Bengkok	437.205.000	Abrasi (sudah Jadi Lautan)
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	364	2018	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	18/04/2007	HP. 001	Kantor Kelurahan Mangunharjo	Pembelian	17.472.000	
3	Tanah kosong yang tidak diusahakan	2830	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	23/12/2020	HP. 034	Fasum Sarana olahraga	Pembelian	5.660.000	
4	Tanah Sawah	11340	2014	RT. 01 RW. 04	Hak Pakai	30/04/2007	HP 13	Sawah	Ex-Bengkok	306.180.000	
5	Tanah Sawah	7870	1976	RT. 01 RW. 04	Hak Pakai	30/04/2007	HP 26	Sawah	Ex-Bengkok	143.200.000	Rencana Rusunawa
6	Tanah Sawah	9538	1976	RT. 01 RW. 04	Hak Pakai	30/04/2007	HP 10	Sawah	Ex-Bengkok	23.500.000	
7	Tanah Sawah	10044	1976	RT. 01 RW. 04	Hak Pakai	30/04/2007	HP 9	Sawah	Ex-Bengkok	25.000.000	
8	Tanah Sawah	3800	1976	RT. 01 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 17	Sawah	Ex-Bengkok	80.000.000	
9	Tanah Sawah	8465	1976	RT. 01 RW. 04	Hak Pakai	20/04/2007	HP 3	Sawah	Ex-Bengkok	28.300.000	
10	Tanah Sawah	3527	1976	RT. 01 RW. 04	Hak Pakai	30/04/2007	HP 5	Sawah	Ex-Bengkok	83.600.000	
11	Tanah Sawah	6769	1976	RT. 01 RW. 04	Hak Pakai	20/04/2007	HP 12	Sawah	Ex-Bengkok	116.000.000	

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
12	Tanah Sawah	37616	1976	RT. 02 RW. 01	Hak Pakai	24/08/2007	HP 30	Sawah	Ex-Bengkok	740.000.000	
13	Tanah Sawah	3196	1976	RT. 02 RW. 04	Hak Pakai	30/04/2007	HP 16	Sawah	Ex-Bengkok	68.000.000	
14	Tanah Sawah	10173	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 25	sawah	Ex-Bengkok	32.000.000	
15	Tanah Sawah	8521	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 24	Sawah	Ex-Bengkok	17.500.000	
16	Tanah Sawah	8603	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 14	Sawah	Ex-Bengkok	175.000.000	
17	Tanah Sawah	9728	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 27	Sawah	Ex-Bengkok	18.000.000	
18	Tanah Sawah	8829	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 18	Sawah	Ex-Bengkok	15.000.000	
19	Tanah Sawah	7432	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 20	Sawah	Ex-Bengkok	13.500.000	
20	Tanah Sawah	3139	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 21	Sawah	Ex-Bengkok	9.000.000	
21	Tanah Sawah	3208	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 22	Sawah	Ex-Bengkok	6.500.000	
22	Tanah Sawah	2926	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 23	Sawah	Ex-Bengkok	5.000.000	
23	Tanah Sawah	5532	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 15	Sawah	Ex-Bengkok	8.000.000	
24	Tanah Sawah	7528	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 11	Sawah	Ex-Bengkok	11.730.000	
25	Tanah Sawah	33505	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	24/08/2007	HP 28	Sawah	Ex-Bengkok	670.100.000	
26	Tanah Sawah	15070	1976	RT. 04 RW. 04	Hak Pakai	30/04/2007	HP 19	sawah	Ex-Bengkok	301.400.000	

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
27	Tanah Sawah	7500	1976	RT. 04 RW. 04	Hak Pakai	30/04/2007	HP 6	Sawah	Ex-Bengkok	15.000.000	
28	Tanah Sawah	4440	1976	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 7	Sawah	Ex-Bengkok	8.880.000	
29	Tanah Sawah	25547	1976	RT. 04 RW. 04	Hak Pakai	24/08/2007	HP 29	Sawah	Ex-Bengkok	510.940.000	
30	Tanah Sawah	7482	2014	RT. 03 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 4	Sawah	Ex-Bengkok	202.014.000	
31	Tanah Sawah	25230	2018	RT. 04 RW. 04	Hak Pengelolaan	30/09/2020	HP. 033	Pertanian	Ex-Bengkok	1.293.600.000	
	KELURAHAN RANDUGARUT										
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1180	1946	RT. 01 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 14	Kantor dan Balai Kelurahan	Ex-Bengkok	60.480.000	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	904	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 15	Rumah Dinas Lurah	Ex-Bengkok	43.392.000	
3	Tanah Sawah	6825	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 23	Sawah	Ex-Bengkok	327.600.000	
4	Tanah Sawah	6953	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 18	Sawah	Ex-Bengkok	333.744.000	
5	Tanah Sawah	12572	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 19	Sawah	Ex-Bengkok	603.456.000	
6	Tanah Sawah	3012	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 20	Sawah	Ex-Bengkok	144.576.000	
7	Tanah Sawah	3364	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 21	Sawah	Ex-Bengkok	161.472.000	
8	Tanah Sawah	7008	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 22	Sawah	Ex-Bengkok	336.384.000	
9	Tanah Sawah	2613	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 16	Sawah	Ex-Bengkok	125.424.000	

No.	Nama Barang /Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
10	Tanah Sawah	3149	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 10	Sawah	Ex-Bengkok	151.152.000	
11	Tanah Sawah	3443	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 11	Sawah	Ex-Bengkok	165.264.000	
12	Tanah Sawah	6991	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 9	Sawah	Ex-Bengkok	335.568.000	
13	Tanah Sawah	8370	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 12	Sawah	Ex-Bengkok	401.760.000	
14	Tanah Sawah	11471	1946	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 13	Sawah	Ex-Bengkok	550.608.000	
15	Tanah Sawah	7310	2009	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	30/04/2007	HP 17	Sawah	Ex-Bengkok	124.800.000	
16	Tanah Lapangan Sepak Bola	12625	2011	RT. 04 RW. 01	Hak Pakai	28/12/2007	HP 25	Lap OR	Ex-Bengkok	606.000.000	

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Tugu

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
	KECAMATAN TUGU							
1	Kantor Kecamatan Tugu	Baik	589	Jl. Walisongo Km 10	589	HP. 214	Ex-Bengkok	3.254.175.000
2	Rumah Dinas Camat	Kurang Baik	100	Jl. Walisongo Km 10	100	HP. 214	Ex-Bengkok	119.030.000
3	Musholla Kecamatan Tugu	Kurang Baik	49	Jl. Walisongo Km 10	49	HP. 214	Ex-Bengkok	58.800.000
	KELURAHAN JERAKAH							

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
1	Kantor Kelurahan	Baik	200	Jl. Stasiun RW. 03	200	HP. 002	Ex-Bengkok	522.422.000
2	Balai Kelurahan	Kurang Baik	315	Jl. Stasiun RW. 03	315	HP. 002	Ex-Bengkok	360.000.000
3	Rumah Dinas Lurah	Kurang Baik	45	Jl. Stasiun RW. 03	45	HP. 002	Ex-Bengkok	54.000.000
	KELURAHAN TUGUREJO							
1	Kantor Kelurahan	Baik	150	Jl. Tugurejo Timur RW. 05	150	HP. 061	Ex-Bengkok	294.320.000
2	Balai Kelurahan	Kurang Baik	432	Jl. Tugurejo Timur RW. 05	432	HP. 061	Ex-Bengkok	229.094.890
3	Rumah Dinas Lurah	Kurang Baik	45	Jl. Tugurejo Timur RW. 05	45	HP. 061	Ex-Bengkok	45.000.000
	KELURAHAN KARANGANYAR							
1	Kantor Kelurahan	Baik	120	Jl. Masjid RW. 01	120	HP 13	Hibah	540.000.000
2	Balai Kelurahan	Kurang Baik	200	Jl. Masjid RW. 01	200	HP 13	Hibah	150.000.000
	KELURAHAN RANDUGARUT							
1	Kantor Kelurahan	Baik	195	Jl. Oerip Sumoharjo No. 10	195	HP 14	Ex-Bengkok	322.515.000
2	Balai Kelurahan	Kurang Baik	200	Jl. Oerip Sumoharjo No. 10	200	HP 14	Ex-Bengkok	400.000.000
3	Rumah Dinas	Kurang Baik	45	Jl. Sabinsari RW. 01	45	HP 15	Ex-Bengkok	45.000.000
	KELURAHAN MANGKANG WETAN							
1	Kantor Kelurahan	Baik	36	Jl. Karanggayam RW. 04	36	HP. 008	Proses Tukar Guling	119.625.000
2	Balai Kelurahan	Kurang Baik	210	Jl. Karanggayam RW. 04	210	HP. 008	Proses Tukar Guling	723.211.310

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
3	Rumah Dinas	Kurang Baik	45	Jl. Lapangan KaliSasak	45	HP. 25	Ex-Bengkok	97.237.000
	KELURAHAN MANGKANG KULON							
1	Kantor Kelurahan	Kurang Baik	120	Jl. Oerip Sumoharjo	120	HP. 03	Ex-Bengkok	218.190.000
2	Balai Kelurahan	Kurang Baik	250	RT.05 RW.04 Kelurahan	250	HP. 03	Ex-Bengkok	750.000.000
3	Rumah Dinas	Kurang Baik	45	Mangkang Kulon	45	HP. 03	Ex-Bengkok	45.000.000
	KELURAHAN MANGUNHARJO							
1	Kantor Kelurahan dan Balai	Kurang Baik	300	Jl. Laud RW. 01	300	HP. 001	Pembelian	700.000.000
2	Rumah Dinas	Kurang Baik	40	Jl. Pannggung RW. 04	40	HP. 31	Ex-Bengkok	40.000.000

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tugu

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Tugu.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Tugu

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Tugu berdasarkan bidang urusan kewilayahan terbagi menjadi capaian kinerja urusan kewilayahan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Tugu pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Indikator Tujuan :																
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	87	93	94	95	85	87	93	94	95.15	100%	100%	100%	100%	101%
2	Indikator Sasaran :																
a	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	100%	-	-
b	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	N/A	90%	100%	100%	100%	N/A	90%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
c	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	80%	95%	97%	98%	99%	80%	95%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	N/A	75%	-	-	N/A	N/A	75%	-	-	N/A	N/A	100%	-	-
e	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	81.68%	83.36%	85.04%	86.72	N/A	81.68%	83.36%	85.04%	86.72	N/A	100%	100%	100%	100%
f	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	N/A	87%	90%	92%	95%	N/A	87%	90%	92%	95%	N/A	100%	100%	100%	100%
3	Indikator Program																
a	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
b	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
c	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
d	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persen	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
e	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
f	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Tugu pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
4	Indikator Lainya																
	Nilai AKIP Kecamatan Tugu	Nilai	N/A	N/A	70.01	76	76.15	N/A	N/A	70.01	76	76.15	N/A	N/A	100%	100%	100%

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tugu

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Tugu. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Tugu. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Tugu.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Ang	Rea
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	N/A	8.916.704.982	9.635.994.021	10.468.050.106	12.346.852.001	N/A	8.193.708.417	9.078.108.241	9.690.751.471	10.606.057.863	N/A	91,9	94,2	92,6	85,90	12%	27%
Program penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	N/A	4.486.732.497	2.145.592.378	2.129.075.020	2.177.009.712	N/A	3.726.066.395	1.953.536.315	2.040.885.386	2.132.686.406	N/A	83,1	91,1	95,9	98	-51%	-39%
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	10.221.111.701	11.089.303.908	14.187.145.742	18.284.866.243	N/A	9.787.046.904	10.439.593.435	13.550.555.412	17.693.501.736	N/A	95,8	94,1	95,5	96,8	22%	22%
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban	N/A	41.600.000	50.748.000	22.500.000	75.540.000	N/A	40.566.200	13.440.000	22.500.000	74.510.000	N/A	97,5	26,5	100	98,6	67%	77%
Program penyelenggaran urusan pemerintahan umum	N/A	-	12.258.000	72.667.550	87.700.400	N/A	-	10.255.000	70.475.000	87.625.000	N/A	-	83,7	97	99,9	257%	306%

c. Kinerja Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Gunungpati senantiasa menyelenggarakan pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, partisipasi, serta berorientasi pada hasil. Penyelenggaraan pelayanan tersebut berpedoman pada tiga bidang utama pembangunan, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan manusia, dan bidang kesejahteraan masyarakat.

1. Pengarusutamaan Gender dan Anggaran responsif Gender
   Kecamatan Tugu berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberi manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender diproyeksikan sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Implementasi Anggaran Responsif Gender juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.
2. Kota Layak Anak
   Sebagai bagian dari Kota Semarang, Kecamatan Tugu mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terhadap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA.
3. Penanggulangan Kemiskinan
   Kemiskinan masih menjadi tantangan di Kecamatan Tugu. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada strategi pemberdayaan masyarakat, penguatan akses permodalan, peningkatan keterampilan, serta optimalisasi program perlindungan sosial. Sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan stakeholder lainnya diperlukan agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
4. Percepatan Penurunan Stunting
   Dalam rangka percepatan penurunan stunting, kecamatan Tugu melaksanakan kegiatan koordinasi lintas sektor serta memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu dan PKK, mendukung penyuluhan gizi, serta menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam kegiatan kesehatan dan pola hidup bersih sehat.
5. Kecamatan Berdaya
   Kecamatan Berdaya merupakan upaya membangun kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta partisipasi aktif warga dalam pembangunan.

6. Posyandu 6 Layanan SPM
   Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah konsep yang mengintegrasikan enam bidang pelayanan yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketertiban Umum dan sosial. Kecamatan berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan pembina agar Posyandu 6 SPM berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.
7. Kerukunan Umat Beragama
   Kerukunan antarumat beragama menjadi fondasi utama kehidupan sosial di Kecamatan Tugu. Pemerintah Kecamatan berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya budaya toleransi, saling menghormati, dan gotong royong dalam bingkai kebhinekaan.
8. Indeks Harmoni
   Kecamatan Tugu berperan penting dalam mendukung Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Pada dimensi ekonomi, kecamatan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi UMKM, koperasi, serta akses bantuan sosial secara adil dan transparan. Pada dimensi sosial, kecamatan menguatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang, kegiatan gotong royong, serta mediasi konflik sosial di tingkat lokal.

Dalam dimensi budaya, kecamatan berkomitmen melestarikan kearifan lokal dan memperkuat toleransi antar komunitas melalui kegiatan seni, tradisi, dan budaya. Sementara pada dimensi keberagamaan, kecamatan memfasilitasi dialog antarumat beragama, mendukung kegiatan sosial-keagamaan, serta melakukan pengawasan partisipatif terhadap potensi intoleransi. Dengan demikian, kecamatan menjadi koordinator, fasilitator, dan mediator yang menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

d. Mitra Kecamatan Tugu dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Tugu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai unsur pelaksana pelayanan yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

1. Kelurahan, sebagai ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan program pelayanan dasar.
2. Koramil, yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Polsek, sebagai mitra dalam penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan koordinasi keamanan lingkungan.
4. Puskesmas, sebagai penyedia layanan kesehatan primer yang mendukung pencapaian indikator kesehatan masyarakat.
5. KORLAP UP2AKBPA, yang berperan dalam pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, serta peningkatan kualitas hidup keluarga.
6. Masyarakat, sebagai subjek dan objek pelayanan yang dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
7. KUA, sebagai mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, pembinaan keluarga sakinah, dan pencatatan pernikahan.
8. UPTD Pendidikan, yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui koordinasi program pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan.

e. Inovasi Kecamatan Tugu

Terkait pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Camat Tugu Wangsuli
   Aplikasi Aplikasi WA khusus “Camat Mangsuli” yang merupakan media sosial Kecamatan Tugu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, saran dan keluhan warga Kecamatan Tugu.
2. Pelayanan Saklar
   Pelayanan Saklar (Sedino Langsung Kelar) adalah pelayanan legalisasi upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan proses sehari langsung jadi untuk jenis pelayanan DPP5 dan surat domisili.
3. Simas Hebat (Satlinmas mengabdi dengan hati, efektif, bermanfaat, aktif dan tangguh
   Adalah partisipasi secara mandiri dan aktif dari satlinmas di Kecamatan Tugu dalam berbagai kegiatan program pemerintah maupun kegiatan warga masyarakat.
4. Tuntas (Tugu Berantas Stunting)
   Merupakan Merupakan bentuk kerjasama CSR Hotel Metro Semarang dengan Pemerintah Kecamatan Tugu, Puskesmas Karanganyar, dan Puskesmas Mangkang dengan memberikan makanan siap makan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita indikasi stunting di wilayah Kecamatan Tugu Kota Semarang.
5. Semanggi (Semarang Berbagi)
   Merupakan bentuk kerjasama CSR PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) dengan Pemerintah Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam menanganan gizi buruk dan warga miskin di Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pemberian sembako dan bahan makan siap olah (sayur mayur dan protein). Program ini menyasar warga miskin dan gizi buruk yang ada di Kelurahan Randugarut dan Karanganyar.

f. Penghargaan Kecamatan Tugu

Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu pada tahun 2024 memperoleh penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Lestari penghargaan tingkat nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program Proklim bertujuan untuk meningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan menahan laju peningkatan emisi gas rumah kaca. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pencapaian ini juga menjadi motivasi kelurahan lain untuk menerapkan program Proklim dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sejahtera.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tugu dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Tugu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya struktur dan kapasitas kelembagaan, yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar unit kerja.
2. Kualitas pelayanan publik yang belum konsisten, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat.
3. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses pelayanan dan monitoring belum sepenuhnya digital dan efisien.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, yang menyebabkan rendahnya dampak pembangunan berbasis komunitas.

5. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang mempengaruhi pelaksanaan program secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Tugu untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Dukungan kebijakan pemerintah kota dan nasional terhadap penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
2. Kemajuan teknologi digital, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi pengelolaan data.
3. Potensi kolaborasi lintas sektor, baik dengan OPD lain, lembaga masyarakat, maupun perguruan tinggi untuk inovasi pelayanan dan pemberdayaan.
4. Semangat reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja, yang mendorong perbaikan sistem dan budaya kerja.
5. Ketersediaan SDM yang berdedikasi dan terbuka terhadap pengembangan kapasitas, sebagai modal penting dalam transformasi pelayanan.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Tugu.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Tugu diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Tugu telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Tugu.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah **“Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan”**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Tugu terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **“Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan”**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah **“Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan”**.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang

Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Tugu Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Tugu Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Tugu;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Tugu;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Tugu Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Tugu;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tugu;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Tugu;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Tugu;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Tugu;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Tugu;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Tugu;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Tugu;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Tugu;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Tugu.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Tugu Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
"Belum Optimalnya Kualitas Kelembagaan, Penyelenggaraan Pelayanan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tugu"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Tugu	Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Tugu
		Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tugu
		Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Tugu

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
2	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Tugu	Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Tugu
		Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Tugu
		Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Tugu
		Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Tugu
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Tugu
3	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu
		Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Tugu
		Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu
		Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Tugu

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun

2025-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif."

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

1) Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
2) Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
3) Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
4) Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.**

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi

pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.**

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 **Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 **Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Tugu mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola**

Pemerintahan yang baik dan Inklusif" dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **"Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas."**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat" (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Tugu mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat" (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran "Indeks Pelayanan Publik" (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran "meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang" (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran "Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan" (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah" (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Tugu secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

c. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Kecamatan Tugu tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementria / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Dalam sistem pengembangan wilayah Kota, Kecamatan dikelompokkan dalam BWK yang meliputi:

1. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa berskala internasional;
   - pusat pemerintahan Provinsi; dan
   - pusat pemerintahan Kota.
2. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Tugu, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pusat pendidikan kepolisian; dan
   - pusat olahraga

3. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara, dengan rencana pengembangan fungsi utama:
   - transportasi laut;
   - transportasi udara; dan
   - kantor pelayanan pemerintahan Provinsi.
4. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk; dengan rencana pengembangan fungsi utama berupa industri.
5. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - jasa pertemuan dan pameran.
6. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang, dengan rencana pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi.
7. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perkantoran militer; dan
   - perdagangan dan jasa.
8. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pendidikan tinggi; dan
   - paru-paru Kota.
9. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Tugu, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
   - paru-paru Kota.
10. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
    - perdagangan dan jasa; dan
    - industri.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan adalah BWK X dengan luas kurang lebih 6.393 hektar, dengan rencana pengembangan fungsi utama sebagai wilayah perdagangan, jasa dan industri. Sedangkan untuk rencana struktur ruang Kecamatan Tugu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan kota, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota di BWK X adalah Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, dan Kelurahan Wonosari.
2. Pusat lingkungan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala pelayanan lingkungan permukiman. Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di BWK X yaitu:
   - pusat lingkungan X.1 terdapat di Kelurahan Ngaliyan dengan daerah pelayanan Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Purwoyoso;
   - pusat lingkungan X.2 terdapat di Kelurahan Tambakaji dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonosari, Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Beringin, Kelurahan Wates dan Kelurahan Podorejo; dan
   - pusat lingkungan X.3 terdapat di Kelurahan Mangunharjo dengan daerah pelayanan Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Randugarut,

Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tugurejo dan Kelurahan Jerakah.

Selain itu, dalam bidang transportasi juga direncanakan akan ada pembangunan dan peningkatan terminal penumpang Tipe A di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu serta pembangunan dan peningkatan staisiun kereta api operasional di Staisun Mangkang dan Stasiun Jerakah Kecamatan Tugu.

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Tugu Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

Berdasarkan KLHS, isu yang terkait dengan Kecamatan Tugu berfokus pada Penyelenggaraan *Good Governance*, yang mencakup upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Isu-isu ini tidak hanya berhubungan dengan peningkatan mutu pelayanan publik, tetapi juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kesadaran hukum serta ketertiban umum. Identifikasi isu ini penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program kerja yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memudahkan pemahaman, isu-isu strategis tersebut telah dikategorikan ke dalam tema besar yang menggambarkan prioritas pembangunan di Kecamatan Tugu. Rincian tema dan isu yang masuk dalam kriteria strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Tema Isu KLHS terhadap Kecamatan Tugu Kota Semarang

Tema Isu	Isu-Isu Yang Mausk Kriteria Strategis
Penyelenggaraan Good Governance	Standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Tugu

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah:

1. Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia;
2. Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas;
3. Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat;

4. Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas;
5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat;
6. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota;
7. Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu adalah isu strategis ke tujuh, yaitu "Penyelenggaraan Good Governance". Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : "standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang".

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tugu, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tugu, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang. Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Isu Perangkat Daerah
Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Tugu	Perlunya memperkuat tata kelola emerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Tugu
	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Tugu					Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu
	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu					Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Tugu

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Kecamatan Tugu sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Tugu Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Tugu sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Tugu. Adapun tujuan Kecamatan Tugu untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tugu”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Tugu Kota Semarang, yaitu :

1. “Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Tugu”. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (60%); Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (20%); serta Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan (20%).
2. “Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Tugu”. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan aktif (20%); Partisipasi musyawarah rencana pembangunan dari seluruh elemen masyarakat (30%); serta Efektivitas kegiatan yang berdampak sosial, ekonomi, lingkungan (50%).

Dalam rangka pencapaian tujuan pada Kecamatan Tugu, ditetapkan sasaran sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Kecamatan Tugu
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tugu.
      Indikator ini mengacu kepada Peraturan Mentri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tugu
Indikator ini mengacu pada pedoman survey kepuasan masyarakat dalam Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pelayanan Publik Kecamatan
Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tugu”. Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Gunungpati terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tugu”. Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Tugu melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Tugu.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat											
	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tugu		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tugu	Angka	95,00	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tugu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tugu	Angka	76,20	76,50	76,55	76,60	76,65	76,70	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tugu	Angka	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tugu	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tugu	Persen	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	Angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan											
		SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	Angka	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Tugu mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Tugu dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tugu	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tugu	Memaksimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tugu	Menguatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tugu	Menyempurnkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tugu
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu	Penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu	Percepatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	Percepatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Tugu agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Tugu

merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Tugu.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan
Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Tugu	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tugu	
			Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Tugu	
			Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Tugu	
			Peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Tugu	
			Peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Tugu	
			Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Tugu	
			Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Tugu	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	
			Peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Tugu	
			Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	
			Peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Tugu	

Tabel 3.4
Tujuan, Sesaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tugu	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tugu	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tugu	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Tugu 2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tugu 3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Tugu
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tugu	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kecamatan Tugu 2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait 3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Tugu 4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Tugu 5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Tugu 6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Tugu
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kecamatan Tugu 2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Tugu 3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu 4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Tugu

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tugu

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Tugu untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tugu**				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tugu** **Nilai Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu**		**Camat**
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tugu			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tugu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tugu		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas Kecamatan Tugu Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Kecamatan
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tugu beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				sesuai peraturan perundangan			
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Tugu	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				aparatur Kecamatan Tugu			
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05. 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0006 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu yang selesai ditindaklanjuti	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu sesuai ketentuan	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tugu			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tugu		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan Tugu	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			kebutuhan masyarakat Kecamatan Tugu				
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Seksi Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayanan Publik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jerakah	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Jerakah
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Jerakah	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jerakah)	Sekretaris dan Staf Kel. Jerakah
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Lurah Tugurejo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang Ada di Kelurahan Tugurejo	Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tugurejo	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tugurejo)	Sekretaris dan Staf Kel. Tugurejo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karanganyar	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Karanganyar
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Karanganyar	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karanganyar)	Sekretaris dan Staf Kel. Karanganyar
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Randugarut	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Lurah Randugarut

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Randugarut	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Randugarut)	Sekretaris dan Staf Kel. Randugarut
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangkang Wetan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Mangkang Wetan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mangkang Wetan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangkang Wetan)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangkang Wetan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangunharjo	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Lurah Mangunharjo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mangunharjo	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunharjo)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangunharjo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangkang Kulon	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Mangkang Kulon
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mangkang Kulon	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangkang Kulon)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangkang Kulon
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Tugu	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pembangunan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jerakah	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Jerakah
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Jerakah	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jerakah)	Sekretaris dan Staf Kel. Jerakah
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tugurejo	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tugurejo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tugurejo	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tugurejo)	Sekretaris dan Staf Kel. Tugurejo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karanganyar	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Karanganyar

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karanganyar	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karanganyar)	Sekretaris dan Staf Kel. Karanganyar
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Randugarut	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Randugarut
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Randugarut	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Randugarut)	Sekretaris dan Staf Kel. Randugarut
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangkang Wetan	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Mangkang Wetan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mangkang Wetan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Mangkang Wetan)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangkang Wetan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangunharjo	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Mangunharjo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mangunharjo	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Mangunharjo)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangunharjo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangkang Kulon	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Mangkang Kulon
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mangkang Kulon	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Mangkang Kulon)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangkang Kulon
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib Kecamatan Tugu		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu	7.01.04 Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada kecamatan Tugu		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam		Meningkatnya kualitas kinerja lembaga			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga		Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
pembangunan di Kota Semarang		kemasyarakatan Kecamatan Tugu			kemasyarakatan Kecamatan Tugu		
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Seksi Pembangunan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jerakah	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Jerakah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jerakah)	Sekretaris dan Staf Kel. Jerakah
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tugurejo	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tugurejo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tugurejo)	Sekretaris dan Staf Kel. Tugurejo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karanganyar	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Karanganyar
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karanganyar)	Sekretaris dan Staf Kel. Karanganyar
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Randugarut	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Randugarut
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Randugarut)	Sekretaris dan Staf Kel. Randugarut
				Meningkatnya partisipasi masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangkang Wetan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Mangkang Wetan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				dalam kegitan pemberdayaan			
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangkang Wetan)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangkang Wetan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangunharjo	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Mangunharjo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangunharjo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangkang Kulon	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Mangkang Kulon
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangkang Kulon)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangkang Kulon
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kecamatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pembangunan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Jerakah	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Jerakah
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Jerakah	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jerakah)	Sekretaris dan Staf Kel. Jerakah
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Tugurejo	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tugurejo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Tugurejo	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tugurejo)	Sekretaris dan Staf Kel. Tugurejo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Karanganyar	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Karanganyar
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Karanganyar	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karanganyar)	Sekretaris dan Staf Kel. Karanganyar
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Tugu	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga	Lurah Randugarut

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				sebagai mitra pemerintah		Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Randugarut	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Randugarut)	Sekretaris dan Staf Kel. Randugarut
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Mangkang Wetan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Mangkang Wetan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mangkang Wetan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mangkang Wetan)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangkang Wetan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Mangunharjo	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Mangunharjo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mangunharjo	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mangunharjo)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangunharjo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Mangkang Kulon	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Mangkang Kulon
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mangkang Kulon	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mangkang Kulon)	Sekretaris dan Staf Kel. Mangkang Kulon
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Perangkat Daerah Kecamatan Tugu Mendukung pencapaian program prioritas Wali Kota dan Wakli Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3	Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan		
6	Pengembangan musrenbang tematik			

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
7	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan		
8	Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi			
9	Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Tugu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Tugu Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana

program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan
Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01 KECAMATAN TUGU				**26.357.463.547**		**28.685.153.772**		**29.698.272.904**		**29.884.368.493**		**30.323.329.447**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**13.832.693.762**		**15.400.457.209**		**16.082.820.835**		**16.208.161.337**		**16.503.813.624**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas Kecamatan Tugu**	**100 %**	**100 %**	**13.832.693.762**	**100 %**	**15.400.457.209**	**100 %**	**16.082.820.835**	**100 %**	**16.208.161.337**	**100 %**	**16.503.813.624**	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
7.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**34.000.000**		**37.740.000**		**39.249.600**		**39.642.095**		**39.642.095**	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tugu beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan**	**100 %**	**100 %**	**34.000.000**	**100 %**	**37.740.000**	**100 %**	**39.249.600**	**100 %**	**39.642.095**	**100 %**	**39.642.095**	
7.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.550.000		5.772.000		5.829.720		5.829.720	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.550.000	4 Dokumen	5.772.000	6 Dokumen	5.829.720	4 Dokumen	5.829.720	
7.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.800.000		1.998.000		2.077.920		2.098.699		2.098.699	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.998.000	1 Dokumen	2.077.920	1 Dokumen	2.098.699	1 Dokumen	2.098.699	
7.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.800.000		1.998.000		2.077.920		2.098.699		2.098.699	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.998.000	1 Dokumen	2.077.920	1 Dokumen	2.098.699	1 Dokumen	2.098.699	
7.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.800.000		1.998.000		2.077.920		2.098.699		2.098.699	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.998.000	1 Dokumen	2.077.920	1 Dokumen	2.098.699	1 Dokumen	2.098.699	
7.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.800.000		1.998.000		2.077.920		2.098.699		2.098.699	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.998.000	1 Dokumen	2.077.920	1 Dokumen	2.098.699	1 Dokumen	2.098.699	
7.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.800.000		1.998.000		2.077.920		2.098.699		2.098.699	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	5 Laporan	1.800.000	5 Laporan	1.998.000	5 Laporan	2.077.920	5 Laporan	2.098.699	5 Laporan	2.098.699	
7.01.01.1.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				20.000.000		22.200.000		23.088.000		23.318.880		23.318.880	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.200.000	1 Dokumen	23.088.000	1 Dokumen	23.318.880	1 Dokumen	23.318.880	
7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**11.637.872.509**		**12.211.420.454**		**12.812.953.750**		**13.443.968.930**		**14.096.002.061**	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan**	**100 %**	**100 %**	**11.637.872.509**	**100 %**	**12.211.420.454**	**100 %**	**12.812.953.750**	**100 %**	**13.443.968.930**	**100 %**	**14.096.002.061**	
7.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.265.172.509		11.828.423.454		12.419.836.870		13.040.820.880		13.692.854.011	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	53 Orang	70 Orang	11.265.172.509	70 Orang	11.828.423.454	70 Orang	12.419.836.870	70 Orang	13.040.820.880	70 Orang	13.692.854.011	
7.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				370.000.000		380.000.000		390.000.000		400.000.000		400.000.000	
Tersediany Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	370.000.000	12 Dokumen	380.000.000	12 Dokumen	390.000.000	12 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	400.000.000	
7.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				900.000		999.000		1.038.960		1.049.350		1.049.350	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	900.000	1 Laporan	999.000	1 Laporan	1.038.960	1 Laporan	1.049.350	1 Laporan	1.049.350	
7.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				900.000		999.000		1.038.960		1.049.350		1.049.350	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	2 Laporan	12 Laporan	900.000	12 Laporan	999.000	12 Laporan	1.038.960	12 Laporan	1.049.350	12 Laporan	1.049.350	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	/Semesteran SKPD (Laporan)												
7.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				900.000		999.000		1.038.960		1.049.350		1.049.350	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	1 Dokumen	999.000	1 Dokumen	1.038.960	1 Dokumen	1.049.350	1 Dokumen	1.049.350	
7.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**30.000.000**		**33.300.000**		**34.632.000**		**34.978.320**		**34.978.320**	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tugu	**Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Tugu**		**89 Angka**	**30.000.000**	**91 Angka**	**33.300.000**	**92 Angka**	**34.632.000**	**93 Angka**	**34.978.320**	**94 Angka**	**34.978.320**	
7.01.01.1.05. 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		11.100.000		11.544.000		11.659.440		11.659.440	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	11.100.000	4 Dokumen	11.544.000	4 Dokumen	11.659.440	4 Dokumen	11.659.440	
7.01.01.1.05. 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		22.200.000		23.088.000		23.318.880		23.318.880	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi		100 Orang	20.000.000	100 Orang	22.200.000	100 Orang	23.088.000	100 Orang	23.318.880	100 Orang	23.318.880	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan												
7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				**713.000.000**		**1.002.930.000**		**1.019.047.200**		**823.237.672**		**773.237.672**	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu**	**100 %**	**100 %**	**713.000.000**	**100 %**	**1.002.930.000**	**100 %**	**1.019.047.200**	**100 %**	**823.237.672**	**100 %**	**773.237.672**	
7.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				116.000.000		128.760.000		133.910.400		135.249.504		135.249.504	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12 Paket	116.000.000	12 Paket	128.760.000	12 Paket	133.910.400	12 Paket	135.249.504	12 Paket	135.249.504	
7.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		24.420.000		25.396.800		25.650.768		25.650.768	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12 Paket	22.000.000	12 Paket	24.420.000	12 Paket	25.396.800	12 Paket	25.650.768	12 Paket	25.650.768	
7.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				89.000.000		98.790.000		102.741.600		103.769.016		103.769.016	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	89.000.000	12 Laporan	98.790.000	12 Laporan	102.741.600	12 Laporan	103.769.016	12 Laporan	103.769.016	
7.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				136.000.000		150.960.000		156.998.400		158.568.384		158.568.384	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	136.000.000	12 Laporan	150.960.000	12 Laporan	156.998.400	12 Laporan	158.568.384	12 Laporan	158.568.384	
7.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				350.000.000		600.000.000		600.000.000		400.000.000		350.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	600.000.000	4 Dokumen	600.000.000	4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	350.000.000	
7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**350.000.000**		**600.000.000**		**600.000.000**		**400.000.000**		**350.000.000**	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu**	**100 %**	**100 %**	**350.000.000**	**100 %**	**600.000.000**	**100 %**	**600.000.000**	**100 %**	**400.000.000**	**100 %**	**350.000.000**	
7.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				350.000.000		600.000.000		600.000.000		400.000.000		350.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18 Unit	20 Unit	350.000.000	20 Unit	600.000.000	20 Unit	600.000.000	20 Unit	400.000.000	20 Unit	350.000.000	
7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**584.000.000**		**619.740.000**		**640.129.600**		**652.830.896**		**652.830.896**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu yang selesai ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**584.000.000**	**100 %**	**619.740.000**	**100 %**	**640.129.600**	**100 %**	**652.830.896**	**100 %**	**652.830.896**	
7.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				234.000.000		259.740.000		270.129.600		272.830.896		272.830.896	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	234.000.000	12 Laporan	259.740.000	12 Laporan	270.129.600	12 Laporan	272.830.896	12 Laporan	272.830.896	
7.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.000.000		360.000.000		370.000.000		380.000.000		380.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	370.000.000	12 Laporan	380.000.000	12 Laporan	380.000.000	
7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**483.821.253**		**895.326.755**		**936.808.685**		**813.503.424**		**557.122.580**	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**483.821.253**	**100 %**	**895.326.755**	**100 %**	**936.808.685**	**100 %**	**813.503.424**	**100 %**	**557.122.580**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tugu sesuai ketentuan												
7.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000		277.500.000		288.600.000		291.486.000		291.486.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	27 Unit	250.000.000	27 Unit	277.500.000	27 Unit	288.600.000	27 Unit	291.486.000	27 Unit	291.486.000	
7.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		33.300.000		34.632.000		34.978.320		34.978.320	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	30 Unit	30.000.000	30 Unit	33.300.000	30 Unit	34.632.000	30 Unit	34.978.320	30 Unit	34.978.320	
7.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				203.821.253		584.526.755		613.576.685		487.039.104		230.658.260	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 Unit	8 Unit	203.821.253	8 Unit	584.526.755	8 Unit	613.576.685	8 Unit	487.039.104	8 Unit	230.658.260	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**2.221.472.602**		**2.456.494.684**		**2.558.787.234**		**2.577.576.922**		**2.621.897.905**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu Kecamatan Tugu**	**100 %**	**100 %**	**2.221.472.602**	**100 %**	**2.456.494.684**	**100 %**	**2.558.787.234**	**100 %**	**2.577.576.922**	**100 %**	**2.621.897.905**	
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tugu	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**146.000.000**		**160.600.000**		**167.024.000**		**167.024.000**		**168.694.240**	
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**146.000.000**	**100 %**	**160.600.000**	**100 %**	**167.024.000**	**100 %**	**167.024.000**	**100 %**	**168.694.240**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6.000.000		6.600.000		6.864.000		6.864.000		6.932.640	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.600.000	1 Laporan	6.864.000	1 Laporan	6.864.000	1 Laporan	6.932.640	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				140.000.000		154.000.000		160.160.000		160.160.000		161.761.600	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	140.000.000	3 Dokumen	154.000.000	3 Dokumen	160.160.000	3 Dokumen	160.160.000	3 Dokumen	161.761.600	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				**1.595.472.602**		**1.767.894.684**		**1.838.610.471**		**1.838.610.471**		**1.856.996.576**	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tugu**	**100 %**	**100 %**	**1.595.472.602**	**100 %**	**1.767.894.684**	**100 %**	**1.838.610.471**	**100 %**	**1.838.610.471**	**100 %**	**1.856.996.576**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				930.472.602		1.036.394.684		1.077.850.471		1.077.850.471		1.088.628.576	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	930.472.602	12 Laporan	1.036.394.684	12 Laporan	1.077.850.471	12 Laporan	1.077.850.471	12 Laporan	1.088.628.976	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	100 %	100 %	95.000.000	100 %	104.500.000	100 %	108.680.000	100 %	108.680.000	100 %	109.766.800	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
secara menyeluruh di Kelurahan Jerakah	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jerakah												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.000.000		104.500.000		108.680.000		108.680.000		109.766.800	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	104.500.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	109.766.800	Kelurahan Jerakah
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tugurejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tugurejo	100 %	100 %	95.000.000	100 %	104.500.000	100 %	108.680.000	100 %	108.680.000	100 %	109.766.800	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.000.000		104.500.000		108.680.000		108.680.000		109.766.800	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	104.500.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	109.766.800	Kelurahan Tugurejo
Terselenggaranya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan	100 %	100 %	95.000.000	100 %	104.500.000	100 %	108.680.000	100 %	108.680.000	100 %	109.766.800	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karanganyar	Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karanganyar												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.000.000		104.500.000		108.680.000		108.680.000		109.766.800	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	104.500.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	109.766.800	Kelurahan Karanganyar
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Randugarut	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Randugarut	100 %	100 %	95.000.000	100 %	104.500.000	100 %	108.680.000	100 %	108.680.000	100 %	109.766.800	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.000.000		104.500.000		108.680.000		108.680.000		109.766.800	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	104.500.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	109.766.800	Kelurahan Randugarut

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mangkang Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangkang Wetan	100 %	100 %	95.000.000	100 %	104.500.000	100 %	108.680.000	100 %	108.680.000	100 %	109.766.800	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.000.000		104.500.000		108.680.000		108.680.000		109.766.800	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	104.500.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	109.766.800	Kelurahan Mangkang Wetan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mangunharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangunharjo	100 %	100 %	95.000.000	100 %	104.500.000	100 %	108.680.000	100 %	108.680.000	100 %	109.766.800	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.000.000		104.500.000		108.680.000		108.680.000		109.766.800	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	104.500.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	109.766.800	Kelurahan Mangunharjo
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mangkang Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangkang Kulon	100 %	100 %	95.000.000	100 %	104.500.000	100 %	108.680.000	100 %	108.680.000	100 %	109.766.800	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.000.000		104.500.000		108.680.000		108.680.000		109.766.800	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	104.500.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	108.680.000	12 Laporan	109.766.800	Kelurahan Mangkang Kulon
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**480.000.000**		**528.000.000**		**549.120.000**		**549.120.000**		**554.611.200**	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 %**	**100 %**	**480.000.000**	**100 %**	**528.000.000**	**100 %**	**549.120.000**	**100 %**	**549.120.000**	**100 %**	**554.611.200**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				480.000.000		528.000.000		549.120.000		549.120.000		554.611.200	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	143.000.000	12 Laporan	148.720.000	12 Laporan	148.720.000	12 Laporan	150.207.200	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jerakah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jerakah	100 %	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	57.200.000	100 %	57.200.000	100 %	57.772.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				50.000.000		55.000.000		57.200.000		57.200.000		57.772.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.772.000	Kelurahan Jerakah
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tugurejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tugurejo	100 %	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	57.200.000	100 %	57.200.000	100 %	57.772.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				50.000.000		55.000.000		57.200.000		57.200.000		57.772.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.772.000	Kelurahan Tugurejo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karanganyar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karanganyar	100 %	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	57.200.000	100 %	57.200.000	100 %	57.772.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				50.000.000		55.000.000		57.200.000		57.200.000		57.772.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.772.000	Kelurahan Karanganyar
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Randugarut	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Randugarut	100 %	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	57.200.000	100 %	57.200.000	100 %	57.772.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				50.000.000		55.000.000		57.200.000		57.200.000		57.772.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.772.000	Kelurahan Randugarut

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangkang Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangkang Wetan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	57.200.000	100 %	57.200.000	100 %	57.772.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				50.000.000		55.000.000		57.200.000		57.200.000		57.772.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.772.000	Kelurahan Mangkang Wetan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangunharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangunharjo	100 %	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	57.200.000	100 %	57.200.000	100 %	57.772.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				50.000.000		55.000.000		57.200.000		57.200.000		57.772.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.772.000	Kelurahan Mangunharjo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di	100 %	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	57.200.000	100 %	57.200.000	100 %	57.772.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Mangkang Kulon	Kelurahan Mangkang Kulon												
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				50.000.000		55.000.000		57.200.000		57.200.000		57.772.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.200.000	12 Laporan	57.772.000	Kelurahan Mangkang Kulon
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**10.139.355.275**		**10.646.915.634**		**10.867.829.527**		**10.908.408.270**		**11.004.125.122**	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu**	**89 %**	**91 %**	**10.139.355.275**	**92 %**	**10.646.915.634**	**93 %**	**10.867.829.527**	**94 %**	**10.908.408.270**	**95 %**	**11.004.125.122**	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**60.000.000**		**63.000.000**		**64.260.000**		**64.260.000**		**64.260.000**	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	7 Laporan	7 Laporan	60.000.000	7 Laporan	63.000.000	7 Laporan	64.260.000	7 Laporan	64.260.000	7 Laporan	64.260.000	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60.000.000		63.000.000		64.260.000		64.260.000		64.260.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	63.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	64.260.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	64.260.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	64.260.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20 Kegiatan	10 Kegiatan	398.855.275	10 Kegiatan	419.390.634	10 Kegiatan	435.754.027	10 Kegiatan	476.332.770	10 Kegiatan	572.049.622	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				398.855.275		419.390.634		435.754.027		476.332.770		572.049.622	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	398.855.275	6 Pokmas/ Ormas	419.390.634	6 Pokmas/ Ormas	435.754.027	6 Pokmas/ Ormas	476.332.770	6 Pokmas/ Ormas	572.049.622	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Jerakah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jerakah	20 Kegiatan	20 Kegiatan	60.000.000	20 Kegiatan	63.000.000	20 Kegiatan	64.260.000	20 Kegiatan	64.260.000	20 Kegiatan	64.260.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				60.000.000		63.000.000		64.260.000		64.260.000		64.260.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	60.000.000	6 Pokmas/ Ormas	63.000.000	6 Pokmas/ Ormas	64.260.000	6 Pokmas/ Ormas	64.260.000	6 Pokmas/ Ormas	64.260.000	Kelurahan Jerakah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Tugurejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tugurejo	20 Kegiatan	20 Kegiatan	80.000.000	20 Kegiatan	84.000.000	20 Kegiatan	85.680.000	20 Kegiatan	85.680.000	20 Kegiatan	85.680.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				80.000.000		84.000.000		85.680.000		85.680.000		85.680.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	80.000.000	6 Pokmas/ Ormas	84.000.000	6 Pokmas/ Ormas	85.680.000	6 Pokmas/ Ormas	85.680.000	6 Pokmas/ Ormas	85.680.000	Kelurahan Tugurejo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Karanganyar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karanganyar	20 Kegiatan	20 Kegiatan	70.000.000	20 Kegiatan	73.500.000	20 Kegiatan	74.970.000	20 Kegiatan	74.970.000	20 Kegiatan	74.970.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				70.000.000		73.500.000		74.970.000		74.970.000		74.970.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	70.000.000	6 Pokmas/ Ormas	73.500.000	6 Pokmas/ Ormas	74.970.000	6 Pokmas/ Ormas	74.970.000	6 Pokmas/ Ormas	74.970.000	Kelurahan Karanganyar
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Randugarut	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Randugarut	20 Kegiatan	20 Kegiatan	60.000.000	20 Kegiatan	63.000.000	20 Kegiatan	64.260.000	20 Kegiatan	64.260.000	20 Kegiatan	64.260.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				60.000.000		63.000.000		64.260.000		64.260.000		64.260.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	60.000.000	6 Pokmas/ Ormas	63.000.000	6 Pokmas/ Ormas	64.260.000	6 Pokmas/ Ormas	64.260.000	6 Pokmas/ Ormas	64.260.000	Kelurahan Randugarut
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangkang Weton	20 Kegiatan	20 Kegiatan	90.000.000	20 Kegiatan	94.500.000	20 Kegiatan	96.390.000	20 Kegiatan	96.390.000	20 Kegiatan	96.390.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				90.000.000		94.500.000		96.390.000		96.390.000		96.390.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	90.000.000	6 Pokmas/ Ormas	94.500.000	6 Pokmas/ Ormas	96.390.000	6 Pokmas/ Ormas	96.390.000	6 Pokmas/ Ormas	96.390.000	Kelurahan Mangkang Wetan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangunharjo	20 Kegiatan	20 Kegiatan	80.000.000	20 Kegiatan	84.000.000	20 Kegiatan	85.680.000	20 Kegiatan	85.680.000	20 Kegiatan	85.680.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				80.000.000		84.000.000		85.680.000		85.680.000		85.680.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	80.000.000	6 Pokmas/ Ormas	84.000.000	6 Pokmas/ Ormas	85.680.000	6 Pokmas/ Ormas	85.680.000	6 Pokmas/ Ormas	85.680.000	Kelurahan Mangunharjo

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Masyarakat di Kelurahan												
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangkang Kulon	20 Kegiatan	20 Kegiatan	70.000.000	20 Kegiatan	73.500.000	20 Kegiatan	74.970.000	20 Kegiatan	74.970.000	20 Kegiatan	74.970.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				70.000.000		73.500.000		74.970.000		74.970.000		74.970.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	70.000.000	6 Pokmas/ Ormas	73.500.000	6 Pokmas/ Ormas	74.970.000	6 Pokmas/ Ormas	74.970.000	6 Pokmas/ Ormas	74.970.000	Kelurahan Mangkang Kulon
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**9.170.500 .000**		**9.629.025 .000**		**9.821.605 .500**		**9.821.605 .500**		**9.821.605 .500**	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemsyarakatan sebagai mitra pemerintah	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya**	**4 Laporan**	**4 Laporan**		**4 Laporan**		**4 Laporan**		**4 Laporan**		**4 Laporan**		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000		133.350.000		136.017.000		136.017.000		136.017.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4 Lembaga	127.000.000	4 Lembaga	133.350.000	4 Lembaga	136.017.000	4 Lembaga	136.017.000	4 Lembaga	136.017.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jerakah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jerakah	1 dokumen	1 dokumen	900.000.000	1 dokumen	945.000.000	1 dokumen	963.900.000	1 dokumen	963.900.000	1 dokumen	963.900.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				900.000.000		945.000.000		963.900.000		963.900.000		963.900.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	900.000.000	6 Lembaga	945.000.000	6 Lembaga	963.900.000	6 Lembaga	963.900.000	6 Lembaga	963.900.000	Kelurahan Jerakah
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tugurejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tugurejo	1 dokumen	1 dokumen	1.800.000.000	1 dokumen	1.890.000.000	1 dokumen	1.927.800.000	1 dokumen	1.927.800.000	1 dokumen	1.927.800.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.800.000.000		1.890.000.000		1.927.800.000		1.927.800.000		1.927.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.800.000.000	6 Lembaga	1.890.000.000	6 Lembaga	1.927.800.000	6 Lembaga	1.927.800.000	6 Lembaga	1.927.800.000	Kelurahan Tugurejo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karanganyar	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karanganyar	1 dokumen	1 dokumen	1.200.000.000	1 dokumen	1.260.000.000	1 dokumen	1.285.200.000	1 dokumen	1.285.200.000	1 dokumen	1.285.200.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.200.000.000		1.260.000.000		1.285.200.000		1.285.200.000		1.285.200.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.200.000.000	6 Lembaga	1.260.000.000	6 Lembaga	1.285.200.000	6 Lembaga	1.285.200.000	6 Lembaga	1.285.200.000	Kelurahan Karanganyar
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Randugarut	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Randugarut	1 dokumen	1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	630.000.000	1 dokumen	642.600.000	1 dokumen	642.600.000	1 dokumen	642.600.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				600.000.000		630.000.000		642.600.000		642.600.000		642.600.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	600.000.000	6 Lembaga	630.000.000	6 Lembaga	642.600.000	6 Lembaga	642.600.000	6 Lembaga	642.600.000	Kelurahan Randugarut
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangkang Wetan	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000.000	1 dokumen	2.100.000.000	1 dokumen	2.142.000.000	1 dokumen	2.142.000.000	1 dokumen	2.142.000.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.000.000.000		2.100.000.000		2.142.000.000		2.142.000.000		2.142.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.000.000.000	6 Lembaga	2.100.000.000	6 Lembaga	2.142.000.000	6 Lembaga	2.142.000.000	6 Lembaga	2.142.000.000	Kelurahan Mangkang Wetan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mangunharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangunharjo	1 dokumen	1 dokumen	1.450.000.000	1 dokumen	1.522.500.000	1 dokumen	1.552.950.000	1 dokumen	1.552.950.000	1 dokumen	1.552.950.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.450.000.000		1.522.500.000		1.552.950.000		1.552.950.000		1.552.950.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.450.000.000	6 Lembaga	1.522.500.000	6 Lembaga	1.552.950.000	6 Lembaga	1.552.950.000	6 Lembaga	1.552.950.000	Kelurahan Mangunharjo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangkang Kulon	1 dokumen	1 dokumen	1.050.000.000	1 dokumen	1.102.500.000	1 dokumen	1.124.550.000	1 dokumen	1.124.550.000	1 dokumen	1.124.550.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.050.000.000		1.102.500.000		1.124.550.000		1.124.550.000		1.124.550.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.050.000.000	6 Lembaga	1.102.500.000	6 Lembaga	1.124.550.000	6 Lembaga	1.124.550.000	6 Lembaga	1.124.550.000	Kelurahan Mangkang Kulon
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.000.000		6.300.000		6.426.000		6.426.000		6.426.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	1 Lembaga	1 Lembaga	6.000.000	1 Lembaga	6.300.000	1 Lembaga	6.426.000	1 Lembaga	6.426.000	1 Lembaga	6.426.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Ditingkatkan Kapasitasnya	Kemasyar akatan	Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**37.500.000**		**39.375.000**		**40.162.500**		**40.162.500**		**40.162.500**	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	**Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				37.500.000		39.375.000		40.162.500		40.162.500		40.162.500	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	12 Laporan	37.500.000	12 Laporan	39.375.000	12 Laporan	40.162.500	12 Laporan	40.162.500	12 Laporan	40.162.500	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**75.864.811**		**83.890.976**		**87.384.337**		**88.026.018**		**89.539.609**	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**75.864.811**		**83.890.976**		**87.384.337**		**88.026.018**		**89.539.609**	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**75.864.811**	**12 Kegiatan**	**83.890.976**	**12 Kegiatan**	**87.384.337**	**12 Kegiatan**	**88.026.018**	**12 Kegiatan**	**89.539.609**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**												
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				75.864.811		83.890.976		87.384.337		88.026.018		89.539.609	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	75.864.811	4 Laporan	83.890.976	4 Laporan	87.384.337	4 Laporan	88.026.018	4 Laporan	89.539.609	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**88.077.097**		**97.395.269**		**101.450.971**		**102.195.946**		**103.953.187**	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu**	**80 %**	**82 %**		**84 %**		**86 %**		**88 %**		**90 %**		
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**88.077.097**		**97.395.269**		**101.450.971**		**102.195.946**		**103.953.187**	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**88.077.097**	**2 Kegiatan**	**97.395.269**	**2 Kegiatan**	**101.450.971**	**2 Kegiatan**	**102.195.946**	**2 Kegiatan**	**103.953.187**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				88.077.097		97.395.269		101.450.971		102.195.946		103.953.187	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	88.077.097	100 Orang	97.395.269	100 Orang	101.450.971	100 Orang	102.195.946	100 Orang	103.953.187	

Rencana Pendapatan di Kecamatan Tugu Tahun 2026 – 2030, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan di Kecamatan Tugu Tahun 2026 – 2030

Uraian Pendapatan Retribusi	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Retribusi Daerah	4.080.000	6.000.000	6.400.000	6.800.000	7.300.000	7.800.000	8.400.000
Retribusi Jasa Usaha	4.080.000	6.000.000	6.400.000	6.800.000	7.300.000	7.800.000	8.400.000
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.080.000	6.000.000	6.400.000	6.800.000	7.300.000	7.800.000	8.400.000

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Tugu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tugu yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks kinerja layanan Kecamatan Tugu	Angka	95,00	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	
2	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tugu	Persen	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	
3	Nilai pemberdayaan lembaga masyarakat Kecamatan Tugu	Angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	Angka	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Unsur Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Kecamatan Tugu Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Unsur Kewilayahan									
1.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persen	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99,30	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Tugu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan unsur penunjang kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Tugu. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Tugu ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tugu.

Permasalahan belum optimalnya kinerja kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian pembangunan wilayah Kecamatan Ngaliyan secara efektif, inklusif, dan partisipatif sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Tugu . Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Tugu.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Tugu. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Tugu sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Tugu Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

43. KECAMATAN MIJEN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang maka Kecamatan Mijen wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
27. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah:

a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang;
b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya unsur kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
c. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
d. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Mijen Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Mijen Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

II.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MIJEN

II.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Tugas dan Fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Mijen bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; dimana disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Mijen menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
i. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
k. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;

l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
m. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
n. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mijen telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a) Camat
Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.
Sekretariat terdiri atas :
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

d) Seksi Pembangunan
Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

f) Seksi Pelayanan Publik
Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

g) Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.

h) Jabatan Fungsional
Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kelurahan

a) Lurah
Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b) Sekretariat Kelurahan
Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

c) Seksi Pembangunan Kelurahan
Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.

d) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.

e) Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Camat Mijen Kota Semarang.

Susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Kecamatan Mijen Kota Semarang dapat diihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

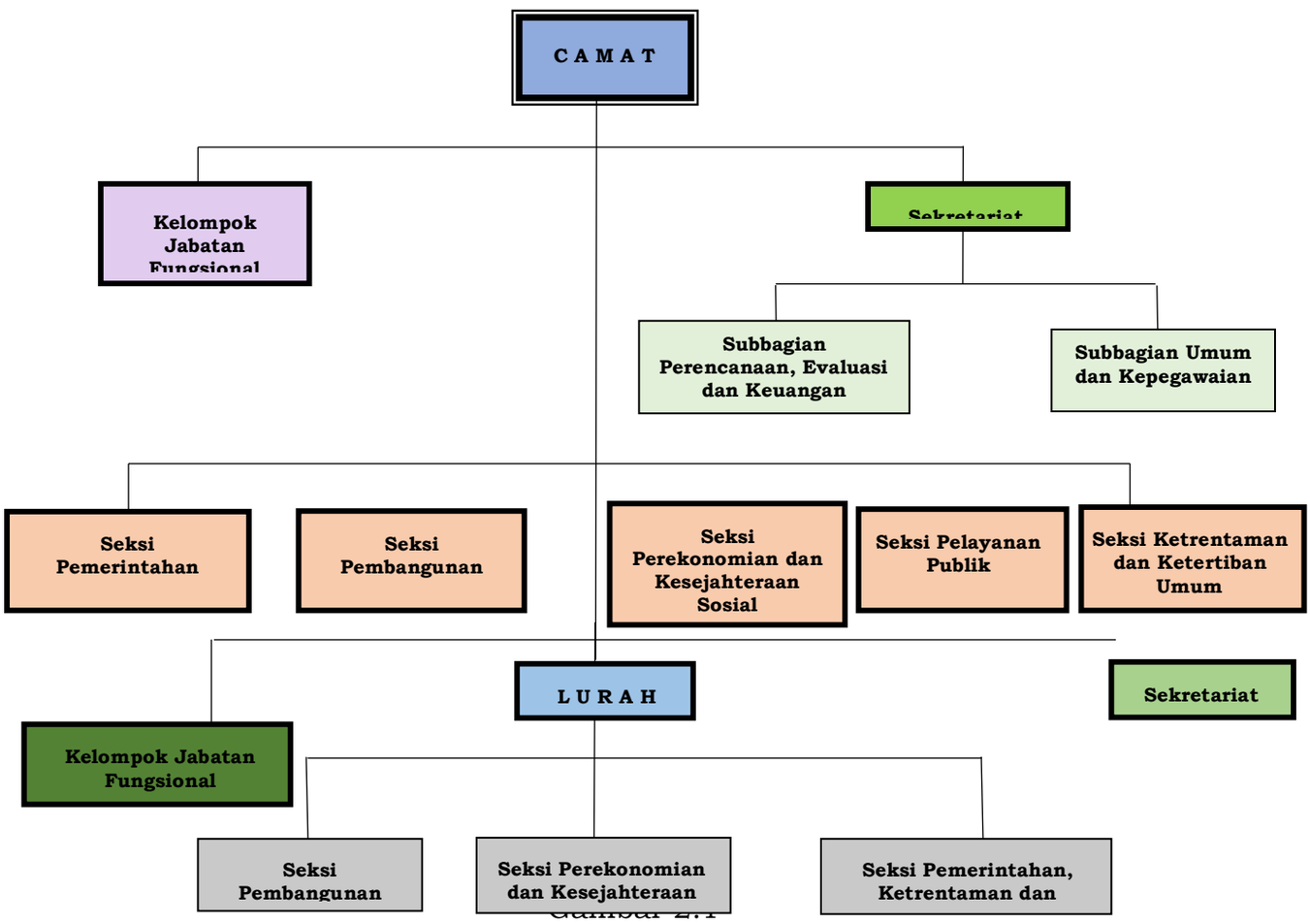

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Mijen Kota Semarang

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Mijen

Adapun untuk Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Mijen yaitu sebagai berikut :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

1) perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5) penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6) penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11) penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
15) penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16) penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;

17) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
18) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
19) penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Mijen menyelenggarakan fungsi :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   d) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   e) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
   g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
   h) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
   b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
   d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
   a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
   b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
   a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   b) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   c) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   d) evaluasi Kelurahan.
9) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
   e) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
   f) Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   g) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   h) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   i) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;

j) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
k) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
l) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
m) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
n) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
o) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
p) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
b) penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
c) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
d) pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan.

11) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
a) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
b) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
c) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
d) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
e) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

13) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
b) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
c) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

14) Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi,
digitalisasi pemerintahan dan investasi.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
7) pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
8) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
9) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
10) pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
11) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
12) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
13) pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
14) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
15) pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
16) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
17) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
18) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
19) pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
20) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan

pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
21) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
22) pelaksanaan administrasi umum Kecamatan; pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
23) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
24) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
25) pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
26) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
27) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
28) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
29) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
6) menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
7) menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
10) menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
11) menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;

12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
13) menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
17) menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
20) menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
22) menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
24) menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
25) menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
26) menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
27) menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
28) menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
29) menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
30) menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

32) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
34) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
35) menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;
36) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
37) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan; mm.menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
39) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
40) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
41) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Pembangunan
Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
6) menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
9) menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
10) menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
11) menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16) menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;

17) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
18) menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);
20) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
21) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
22) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
24) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
25) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
28) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
29) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
30) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
32) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
33) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

8) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
11) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
13) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
14) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia; r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
20) menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
21) menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
22) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
23) menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
24) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
25) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
26) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
27) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

28) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
29) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
30) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
31) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
32) menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
34) menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
35) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
36) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
37) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; mm.menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
39) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
40) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
41) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
42) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
6) menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
7) menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
8) menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;

9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
11) menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
12) menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
14) menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
15) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
16) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
17) menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
18) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
19) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
20) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
21) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
22) menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
24) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
26) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
27) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
11) menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
20) menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum; u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
21) menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
25) menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
28) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
29) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
30) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
32) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
34) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
35) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
37) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
38) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
39) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
40) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2) pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
9) pelaksanaan kegiatan koordinasi;
10) pelaksanaan kegiatan sekretariat;
11) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
12) pelaksanaan kegiatan pembangunan;
13) pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
14) pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
15) pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;

16) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
17) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
18) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
19) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
20) pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
21) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
   3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   4) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   5) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
   2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
   3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
   4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;

2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
2) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
3) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
4) evaluasi Kelurahan;

i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2) peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
3) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
4) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;

5) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
6) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
7) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
8) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
9) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
10) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
2) penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
3) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
4) Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
2) peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3) penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
4) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
5) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;
n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan
o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

II.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Mijen Kota Semarang

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Desember 2024, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 100 pegawai, dengan jumlah 41 pegawai laki – laki (27,70%) dan 59 pegawai perempuan (39,87%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (pegawai Non PNS) sebanyak 48 pegawai, yang terdiri dari 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan 46 pegawai Non ASN, yang terdiri dari 40 pegawai laki-laki (27,02%) dan 8 pegawai perempuan (5,41%). Sehingga jumlah total PNS dan Non PNS pada Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebanyak 148 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk PNS Kecamatan Mijen didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 dan S1 sebanyak 61 orang (41,22 %), D3 sebanyak 34 orang (22,97%), dan lulusan SMA sebanyak 5 orang (3,38%). Sedangkan untuk pegawai Non PNS, 5 orang (3,38%) merupakan lulusan SD, 3 Orang (2,03%) lulusan SMP, 20 Orang (13,51%) lulusan SMA, 5 Orang (3,38%) lulusan D3 dan sisanya sebanyak 15 orang (10,13%) merupakan lulusan S1.

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS				NON PNS			
		L	P	Jumlah	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	L	P	Jumlah	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	**39**	**56**	**95**	**64,19**	**13**	**7**	**20**	**13,51**
1.	S2	3	6	9	6,08	0	0	0	0
2.	S1	27	25	52	35,14	11	4	15	10,13
3.	D3	9	25	34	22,97	2	3	5	3,38
	Bukan Perguruan Tinggi	**2**	**3**	**5**	**3,38**	**27**	**1**	**28**	**18,92**
4.	SLTA	2	3	5	3,38	20	0	20	13,51
5.	SLTP	0	0	0	0	3	0	3	2,03
6.	SD	0	0	0	0	4	1	5	3,38
Jumlah		**41**	**59**	**100**	**67,57**	**40**	**8**	**48**	**32,43**
Jumlah Seluruh Pegawai (PNS & Non PNS)		**148**							

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, per Desember 2024

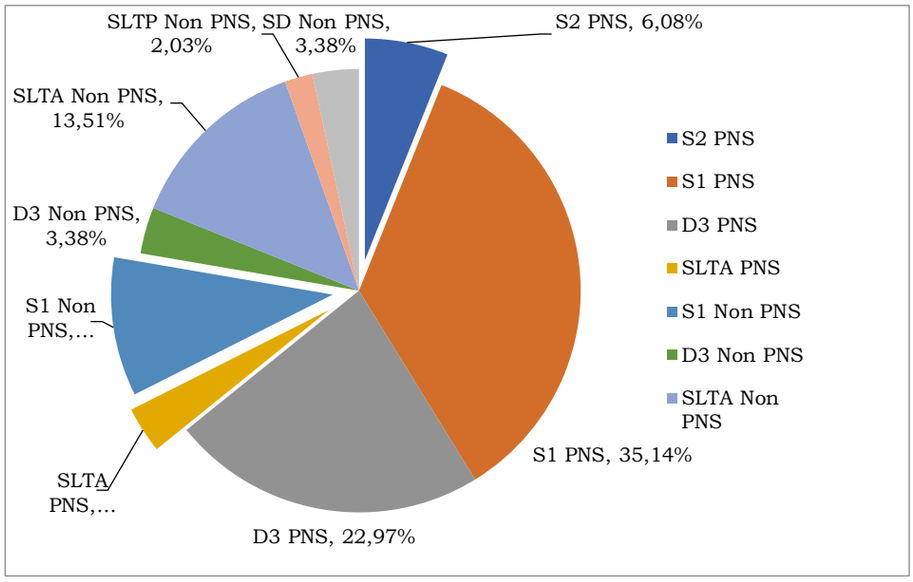

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, per Desember 2024

Gambar 2.2
Komposisi PNS dan Non PNS Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2024
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN Kelurahan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah ASN dan Non ASN per unit pada Kecamatan Mijen
Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kecamatan/Kelurahan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kecamatan	3	12	8	11	1	3	38
2	Cangkiran	-	2	4	1	-	-	7
3	Bubakan	-	3	3	1	-	-	7
4	Karangmalang	-	6	1	-	1	-	8
5	Polaman	-	5	1	1	-	-	7
6	Purwosari	-	6	2	2	-	-	10
7	Tambangan	1	3	2	1	1	-	8
8	Wonolopo	1	3	4	1	-	-	9
9	Mijen	1	3	2	1	-	-	8
10	Jatibarang	-	4	2	1	-	-	7
11	Kedungpane	1	4	1	1	-	1	7
12	Ngadirgo	1	3	2	-	-	-	7
13	Wonoplumbon	-	3	4	1	-	-	8
14	Jatisari	1	5	1	1	-	1	9
15	Pesantren	-	5	2	-	1	-	8
	Jumlah	**9**	**67**	**39**	**24**	**4**	**5**	**148**

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, per Desember 2024

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 5 pegawai (4,90%), golongan III sebanyak 68 pegawai (66,67%), golongan II sebanyak 2 pegawai (26,47%), golongan IX sebanyak 1 pegawai (0,98%) dan golongan VII sebanyak 1 pegawai (0,98%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Pegawai			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Jumlah	
1.	**Golongan IV**			**5**	**4,90**
	IV/b	1	0	1	0,98
	IV/a	1	3	4	3,92
2.	**Golongan III**			**68**	**66,67**
	III/d	10	10	20	19,61
	III/c	12	13	25	24,51
	III/b	7	10	17	16,67
	III/a	2	4	6	5,88
3.	**Golongan II**			**27**	**26,47**
	II/d	0	1	1	0,98
	II/c	8	18	26	25,49
4.	**Golongan IX**			**1**	**0,98**
	IX	0	1	1	0,98
5.	**Golongan VII**			**1**	**0,98**
	VII	1	0	1	0,98
JUMLAH				**102**	**100,00**

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, per Desember 2024

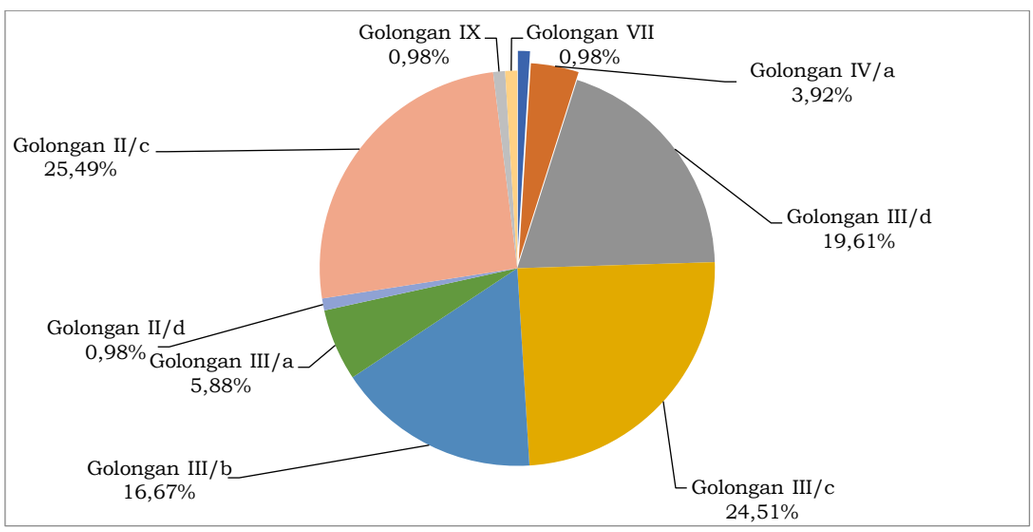

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang,per Desember 2024

Gambar 2.3
Komposisi ASN Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Golongan / Ruang

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN Kelurahan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan Golongan / Ruang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah ASN per unit pada Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2024
Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Kecamatan/Kelurahan	IV	III	II	I	VII	IX	JUMLAH
1	Kecamatan	2	10	5	-	1	1	19
2	Cangkiran		3	2	-			5
3	Bubakan		3	2	-			5
4	Karangmalang		5	1	-			6
5	Polaman		4	1	-			5
6	Purwosari		6	2	-			8
7	Tambangan		4	2	-			6
8	Wonolopo	1	4	2	-			7
9	Mijen	1	3	2	-			6
10	Jatibarang		4	1	-			5
11	Kedungpane		4	1	-			5
12	Ngadirgo		3	2	-			5
13	Wonoplumbon		5	1	-			6
14	Jatisari	1	5	1	-			7
15	Pesantren		5	2	-			7
	Jumlah	**5**	**68**	**27**	**-**	**1**	**1**	**102**

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang,per Desember 2024

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 102 ASN terdapat 2 pegawai (1,96%) yang menduduki eselon III, 66 pegawai (64,70%) yang menduduki eselon IV, 3 pegawai (2,95%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 31 pegawai (30,39%) yang termasuk dalam jabatan pelaksana, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.5
Jumlah ASN Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan
Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1.	Eselon III	2	1,96
2.	Eselon IV	66	64,70
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	3	2,95
4.	Jabatan Pelaksana	31	30,39
JUMLAH		**102**	**100,00**

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang,per Desember 2024

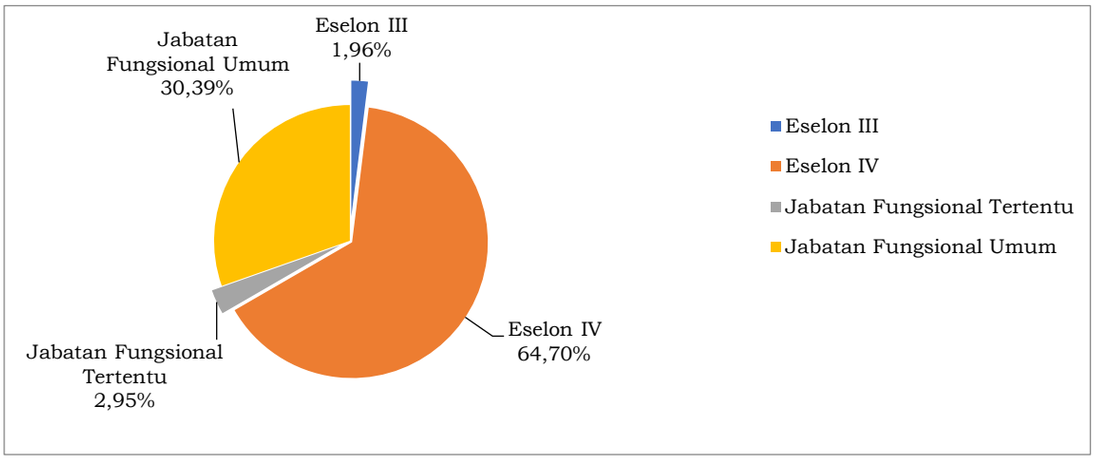

Gambar 2.4
Komposisi ASN Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN Kelurahan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah ASN Kelurahan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2024 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana

No	Kecamatan/Kelurahan	III	IV	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	JUMLAH
1	Kecamatan	2	7	3	7	19
2	Cangkiran	-	3	-	2	5
3	Bubakan	-	3	-	2	5
4	Karangmalang	-	5	-	1	6
5	Polaman	-	4	-	1	5
6	Purwosari	-	5	-	3	8
7	Tambangan	-	4	-	2	6
8	Wonolopo	-	5	-	2	7
9	Mijen	-	4	-	2	6
10	Jatibarang	-	4	-	1	5
11	Kedungpane	-	4	-	1	5
12	Ngadirgo	-	3	-	2	5
13	Wonoplumbon	-	5	-	1	6
14	Jatisari	-	5	-	2	7
15	Pesantren	-	5	-	2	7
	Jumlah	**2**	**66**	**3**	**31**	**102**

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, per Desember 2024

Dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, dari 102 ASN sebanyak 15 pegawai (14,71 %) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah ASN Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024
Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah (Pegawai) yang Mengikuti	Persentase terhadap ASN (%)
1.	ADUM/ Diklat Pim IV	13	12,75
2.	SPAMA/Diklat Pim III	2	1,96
JUMLAH		**15**	**14,71**

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, per Desember 2024

b. Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Mijen Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Aset Tanah Kecamatan Mijen

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Kebun Induk	7720	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 03/P. 114	HP 109	30/04/2007	HP 109	Pertanian	Bengkok Kebayan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	154.400.000	
2	Tanah Pertanian lainnya	25436	31/12/1979	Jl. Raya Tambangan Cangkiran RT 001 RW 002 Kel. Tambangan	13	12/05/2007	13	Pertanian	Pertanian (Sawah, Kantor Kelurahan dan Rumah Dinas)	205.000.000	
3	Tanah Usaha	2551	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02 Jatibarang	HP 20	30/04/2007	HP 20	Pertanian	Ex Bengkok Bondo Deso - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	51.020.000	
4	Tanah Usaha	5791	30/12/1976	Bubakan RT 02 RW 01	HP 00015	30/04/2007	HP 00015	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	500.118.000	
5	Tanah Usaha	852	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 04 / P.23	HP 78	10/04/2007	HP 78	Sawah	Ex Bengkok an. Sarpin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	17.040.000	
6	Tanah Usaha	3365	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.134	HP 151	07/06/2007	HP 151	Sawah	Ex Bengkok an Rohman Bin Karjono - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	67.300.000	
7	Tanah Sawah Irigasi	1283	31/12/1979	RT 01 RW 01 Kel Mijen Kec Mijen	4	30/04/2007	4	Pertanian	Pertanian (Sawah)	3.849.000	
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2249	30/12/1985	Bubakan RT 01 RW 01	HP 08, HP 09, HP 21, dan HP 22	30/04/2007	HP 08, HP 09, HP 21, dan HP 22	Kantor & TK Pertiwi, Rumah Dinas &	HP08=956m2,HP09=119m2,HP21=695m2,HP22=598 - Ex-Bengkok -	600.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
								Balai Kelurahan	50.14.08.00		
9	Tanah Usaha	3854	30/12/1976	Dk. Gerung, RT 03 RW 01 Karangmalang	HP 004	30/04/2007	HP 004	Pertanian	Bengkok Modin 2 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	108.800.000	
10	Tanah Usaha	417	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 01 / P.88	HP 60	30/04/2007	HP 60	Sawah	Ex bengkok an. Jauji Priyati - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	8.340.000	
11	Tanah Usaha	740	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.39	HP 133	30/04/2007	HP 133	Sawah	Ex bengkok an. Wakijan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	14.800.000	
12	Tanah Usaha	3592	30/12/1996	Purwosari, RT 04 RW 02	HP 120	30/04/2007	HP 120	Sawah	Ex bengkok an. Sugiran - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	71.840.000	
13	Tanah Usaha	2217	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.128	HP 28	30/04/2007	HP 28	Sawah	Ex bengkok an Juminem Binti Timbul - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	44.340.000	
14	Tanah Usaha	550	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (33/S.II), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 20	07/06/2007	HP 20	Pertanian SD	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	93.600.000	
15	Tanah Usaha	4117	30/12/2007	Purwosari, RT 05 RW 03 / P.112				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	102.925.000	
16	Tanah Usaha	7570	30/12/1993	JL. PESANTREN / No Persil 14 Kel. Pesantren	HP 6	30/04/2007	HP 6	Pertanian	Ex Kel. Kedungpani - Ex-Bengkok - 50.14.15.00	226.332.000	
17	Tanah Usaha	8469	30/12/1976	Bubakan RT 01 RW 01	HP 00013	30/04/2007	HP 00013	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	246.000.000	
18	Tanah Usaha	2717	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (1A/S.III)	HP 29	07/06/2007	HP 29	JSDF	Ex Kaperda - Ex-Bengkok -	54.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									50.14.13.00		
19	Tanah Usaha	1870	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (31B/S.III)	HM 144		HM 144	Pertanian	Ex Bengkok Amanat - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	51.300.000	
20	Tanah Usaha	2109	30/12/1976	Purwosari, RT 01 RW 01/P.117	HP 82/81	19/04/2007	HP 82/81	Sawah	Bengkok Bondo Deso - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	42.180.000	
21	Tanah Usaha	2571	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.111 (Blok 12)	HP 135	30/04/2007	HP 135	Sawah	Ex bengkok an. Kandar - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	51.420.000	
22	Tanah Usaha	2059	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.42	HP 140	30/04/2007	HP 140	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	41.180.000	
23	Tanah Usaha	6877	30/12/2001	RT 02 RW 03 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 9	30/04/2007	HP 9	Pertanian	Tukar Guling / Sk. Walikota No. 143/245 - Lain-Lain - 50.14.02.00	77.076.927	
24	Tanah Usaha	9196	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 01 / P.93	HP 106	03/04/2007	HP 106	Sawah	Bengkok Modin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	183.920.000	
25	Tanah Usaha	2698	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/ P.132 b	HP 34	30/04/2007	HP 34	Sawah	Ex bengkok an Sumiran bin Warji - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	53.960.000	
26	Tanah Usaha	4762	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 03 / P.45	HP 129	30/04/2007	HP 129	Sawah	Ex Bengkok an. Muslich - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	95.240.000	
27	Tanah Usaha	394	30/12/1997	Purwosari, RT 03 RW 03	HP 83	30/04/2007	HP 83	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	8.980.000	
28	Tanah Usaha	2480	30/12/1976	Sawah Segelap	HP 00024	30/04/2007	HP 00024	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	94.000.000	
29	Tanah Usaha	2359	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.111 (blok12)	HP 8	30/04/2007	HP 8	Sawah	Ex Bengkok an. Marji Bin Surilastro - Ex-	47.180.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									Bengkok - 50.14.11.00		
30	Tanah Usaha	3232	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 04 / P.23	131	30/04/2007	131	Sawah	Ex Bengkok an. Nadhiroh & Ropiah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	64.520.000	
31	Tanah Usaha	3682	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91a	HP 115	30/04/2007	HP 115	Sawah	Ex Bengkok an Wiryo Kartono - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	73.640.000	
32	Tanah Usaha	1763	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 b	HP 52	21/04/2007	HP 52	Sawah	Ex Bengkok an. Machfud - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	32.260.000	
33	Tanah Usaha	5994	30/12/1976	Krajan, RT 02 RW 02 Karangmalang	HP 0010	30/04/2007	HP 0010	Pertanian	Bengkok Modin - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	105.400.000	
34	Tanah Usaha	1730	30/12/1976	Purwosari, RT 01 RW 02 / P.57	HP 77	19/04/2007	HP 77	Kandang Kerbau	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	34.600.000	
35	Tanah Usaha	3191	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 02/P.54	HP 12	30/04/2007	HP 12	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	63.820.000	
36	Tanah Usaha	9684	30/12/1977	Sidorejo RT 003 RW 003 Kel. Tambangan	HP 017	08/06/2007	HP 017	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	585.600.000	
37	Tanah Usaha	7690	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 03 / P.120	HP 113	30/04/2007	HP 113	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	153.800.000	
38	Tanah Usaha	3931	30/12/1976	RT 02 RW 05 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 30	30/04/2007	HP 30	Pertanian JSDF	Asli Aset Kedungpane - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	66.139.000	
39	Tanah Usaha	1998	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 04 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.66	HP 030	30/04/2007	HP 030	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	53.946.000	
40	Tanah Usaha	3732	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 02 / P.54	HP 50	30/04/2007	HP 50	Kandang Kerbau	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	74.640.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
41	Tanah Usaha	598	30/12/1976	Purwosari RT 02 RW 05/P.157	HP 89	11/04/2007	HP 89	Sawah	Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	11.960.000	
42	Tanah Usaha	1606	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 03 / P.119	HP 73	10/05/2007	HP 73	Sawah	Ex Bengkok an Sutar - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	32.120.000	
43	Tanah Usaha	2442	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.134				Sawah	Ex Bengkok an Ngatimah Binti Sukaemi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penelusuran 2023)	48.840.000	
44	Tanah Usaha	211	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 01 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.8	HP 11		HP 11	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	7.396.000	
45	Tanah Usaha	2013	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 03 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.76	HP 025	30/04/2007	HP 025	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	54.351.000	
46	Tanah Bangunan Industri lainnya (dst)	3841	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penelusuran 2023)	2.880.800.000	
47	tanah kampung lainnya (dst)	1545	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (24/D.I)	HP 18	18/04/2007	HP 18	Sebagian digunakan PKL	- Lain-Lain - 50.14.13.00	165.006.000	
48	Tanah Lapangan Sepak Bola	8119	30/12/1976	Tlogo, RT 01 RW 03 Jatibarang	HP 29		HP 29	Lapangan Sepak Bola	Ex Bengkok Kepetengan - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	162.380.000	
49	Tanah Lapangan Sepak Bola	18771	30/12/1976	Wonolopo, RT 01 RW 08 / P II Kel. Wonolopo Kec. Mijen	HP 043	24/08/2007	HP 043	Lapangan Sepak Bola	Ex Tanah Negara - Lain-Lain - 50.14.04.00	506.817.000	
50	Tanah Tandus lainnya	3043	30/12/2011	Kel Wonoplumbon, Kec Mijen	HP 15	30/04/2007	HP 15	Tanah Erosi	Tanah Ek Bengkok	30.340.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									Kamituwo		
51	Tanah Usaha	2129	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 03 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.78	HP 024	30/04/2007	HP 024	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	57.483.000	
52	Tanah Usaha	2245	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 03 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.80	HP 023	30/04/2007	HP 023	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	60.615.000	
53	Tanah Usaha	3246	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03 / P.128	HP 99	30/04/2007	HP 99	Sawah	Ex Bengkok an. Zini - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	64.920.000	
54	Tanah Usaha	3365	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.42	HP 44		HP 44	Sawah	Asal usul aset : tukar menukar - Lain-Lain - 50.14.11.00	67.300.000	
55	Tanah Usaha	3193	30/12/2007	Purwosari, RT 03 RW 05				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	79.825.000	
56	Tanah Usaha	1633	30/12/2011	Kelurahan Wonolopo RT 04 RW 05 Kecamatan Mijen Kota Semarang	HP 020	30/04/2007	HP 020	Pertanian	Eks Tanah Desa - Lain-Lain - 50.14.04.00	419.000.000	
57	Tanah Usaha	4713	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.128	HP 86	11/04/2007	HP 86	Sawah	Ex bengkok an Tiyami Binti Sujat - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	94.260.000	
58	Tanah Usaha	3541	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.42	HP 103	30/04/2007	HP 103	Sawah	Ex Bengkok an. Rupaat - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	70.820.000	
59	Tanah Usaha	2262	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 03				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	45.240.000	
60	Tanah Usaha	2410	30/12/1997	Purwosari, RT 05 RW 03				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel	48.200.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									usuran 2023)		
61	Tanah Usaha	3907	30/12/2007	Purwosari, RT 03 RW 05 / P.159				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	97.675.000	
62	Tanah Usaha	40839	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 02 (35/S.I), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 31	05/12/2007	HP 31	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	858.000.000	
63	Tanah Usaha	2010	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.111 (Blok 12)	HP 126	30/04/2007	HP 126	Sawah	Ex Bengkok an. Siti Komariyah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	40.200.000	
64	Tanah Usaha	2471	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.111	HP 132	30/04/2007	HP 132	Sawah	Ex Bengkok an Juraemi Bin Karlin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	49.420.000	
65	Tanah Usaha	7518	30/12/1977	Tambangan RT 001 RW 001	HP 004	08/06/2007	HP 004	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	17.900.000	
66	Tanah Usaha	7750	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 03, Kelurahan Polaman, Kec. Mijen	HP 07	30/04/2007	HP 07	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	152.100.000	
67	Tanah Usaha	2500	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 03 (1A/S.III), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 3	28/11/2005	HP 3	Pertanian	Tri Cahya Purnama - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	120.000.000	
68	Tanah Usaha	2786	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 03 / P.119	HP 123	30/04/2007	HP 123	Sawah	Ex Bengkok an Muslim - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	55.720.000	
69	Tanah Usaha	651	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW. 02 / P. 42	HP 79	30/04/2007	HP 79	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	13.020.000	
70	Tanah Usaha	4005	30/12/1976	Setukung, RT 04 RW 02 Jatibarang	HP 24	30/04/2007	HP 24	Pertanian	Ex Bengkok Bondo Desa - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	80.100.000	
71	Tanah Usaha	2098	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 31	30/04/2007	HP 31	Sawah	Ex Bengkok an. Mujiati - Ex-Bengkok -	41.780.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									50.14.11.00		
72	Tanah Usaha	11802	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.42				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	236.040.000	
73	Tanah Usaha	648	30/12/1976	Purwosari, RT 02 RW 01	HP 161	07/06/2007	HP 161	Kantor PKK	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	12.960.000	
74	Tanah Usaha	4982	30/12/1976	Purwosari RT 06 RW 02/P.52	HP 118	30/04/2007	HP 118	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	99.640.000	
75	Tanah Usaha	2089	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03 / P.130	HP 141	30/04/2007	HP 141	Sawah	Ex Bengkok an Muslikhin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	41.960.000	
76	Tanah Usaha	485	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03 / P.128	HP 53	24/04/2007	HP 53	Sawah	Ex Bengkok an. Kasipan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	9.700.000	
77	Tanah Usaha	1112	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03 / P.129 b	HP 65	24/04/2007	HP 65	Sawah	Ex Bengkok an. Nur Hanis - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	22.240.000	
78	Tanah Usaha	1927	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 03 / P.45	HP 136	30/04/2007	HP 136	Sawah	Ex bengkok an. Ngatinah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	38.540.000	
79	Tanah Usaha	5400	30/12/1993	RT 02 RW 05 Kel. Ngadirgo				Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.12.00	275.400.000	
80	Tanah Usaha	2202	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.2011	HP 37	20/04/2007	HP 37	Sawah	Ex Bengkok an. Nagimin Bin Bundel - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	44.160.000	
81	Tanah Usaha	2438	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.42	HP 128	30/04/2007	HP 128	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	48.760.000	
82	Tanah Usaha	1398	30/12/1976	Purwosari, RT 02 RW 05/P.149	HP 114	30/04/2007	HP 114	Sawah	Bengkok Kamituo - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	27.960.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
83	Tanah Usaha	2083	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 01 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.8	HP 12		HP 12	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	74.988.000	
84	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	912	29/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	501.500.000	
85	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6450	30/12/1992	RT 02 RW 02 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 12, HP 16, HP 29, dan HP 31	30/04/2007	HP 12, HP 16, HP 29, dan HP 31	Balai , Rumah Dinas, Kantor Kel, dan Lap Olah Raga	HP 12=640m2, HP 16=265m2, HP 29=795m2,& HP 31=4750m2 - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	750.000.000	
86	Tanah Usaha	4251	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 01/P.636 Blok 91a/SIII	HP 153	07/06/2007	HP 153	Sawah	Eks Bengkok an. Sulasno Mukmin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	85.020.000	
87	Tanah Usaha	2318	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 b	HP 70		HP 70	Sawah	Ex Bengkok an Sudiman - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	46.360.000	
88	Tanah Usaha	2782	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 03 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang /P.70	HP 026	30/04/2007	HP 026	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	75.114.000	
89	Tanah Usaha	31069	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 03 / P.75 Kel. Wonolopo Kec. Mijen				Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	838.863.000	
90	Tanah Usaha	2245	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 03 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.79	HP 022	30/04/2007	HP 022	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	63.747.000	
91	Tanah Usaha	6867	30/12/1977	Genuk RT 001 RW 002 Kel. Tambangan Kec. Mijen	HP 003	08/06/2007	HP 003	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	267.750.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
92	Tanah Usaha	1894	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.51	HP 59	30/04/2007	HP 59	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	37.880.000	
93	Tanah Usaha	4667	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.51	HP 164	07/06/2007	HP 164	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	93.340.000	
94	Tanah Usaha	4813	30/12/2006	Jati Ombo RT 01 RW 01 Kel. Bubakan	HP 4	19/01/2006	HP 4	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	173.268.000	
95	Tanah Usaha	3250	30/12/2007	Purwosari, RT 03 RW 03 / P.128				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	81.250.000	
96	Tanah Usaha	2951	30/12/1976	Polaman RT 01 RW 01 (1A/DIII)	HP 28	07/06/2007	HP 28	JSDF	Ex-Standart - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	76.755.000	
97	Tanah Usaha	3323	30/12/1992	RT 01 RW 02 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 22	30/04/2007	HP 22	Pertanian	Mutasi dari Kel. Jatibarang Lama - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	119.771.000	
98	Tanah Usaha	3657	30/12/1992	RT 04 RW 02 Kel Kedungpane Kec. Mijen	HP 21	30/04/2007	HP 21	Pertanian	Mutasi dari Kel. Jatibarang Lama - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	95.445.000	
99	Tanah Usaha	12889	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 02 / P.53	HP 124	30/04/2007	HP 124	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	256.780.000	
100	Tanah Usaha	42686	30/12/1976	Purwosari, RT 05 RW 03/P.112	HP 167	12/09/2007	HP 167	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	853.720.000	
101	Tanah Usaha	3050	30/12/2007	Purwosari, RT 03 RW 01 / P.82				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	76.250.000	
102	Tanah Kebun Induk	223108	04/08/2013	BSB Mijen	1189,1190, 1201,1202	01/04/2019	1189,1190,1201,1202	pelayanan umum dan pemerintahan	fasum fasos pt.karyadeka alam lestari - - 50.14.12.00	111.500.000.000	
103	Tanah Usaha	5020	30/12/1976	Tlogo, RT 01 RW 03 Jatibarang	HP 14	30/04/2007	HP 14	Pertanian	Ex Bengkok Modin - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	100.400.000	
104	Tanah Usaha	10936	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 02 / P.62	HP 76	19/04/2007	HP 76	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	218.720.000	
105	Tanah Usaha	5615	30/12/1976	Kebondalem, RT 01 RW 03 Karangmalang	HP 00009	30/04/2007	HP 00009	Pertanian	Bengkok Bondodeso - Ex-Bengkok -	90.950.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									50.14.09.00		
106	Tanah Tandus lainnya	6063	30/12/2011	Kel Wonoplumbon, Kec Mijen	HP 16	30/04/2007	HP 16	Tanah Erosi	Tanah Ex's Bengkok	60.630.000	
107	Tanah Tandus lainnya	3013	30/12/2011	Kel Wonoplumbon, Kec Mijen	HP 8	30/04/2007	HP 8	Tanah Erosi	Tanah Eks Bengkok Bayan	30.130.000	
108	Tanah Untuk Makam Umum	1225	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02 Jatibarang	HP 26	05/06/2007	HP 26	Makam	- Ex-Bengkok - 50.14.05.00	33.075.000	
109	Tanah Usaha	4342	30/12/1976	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.94	HP 84	19/04/2007	HP 84	Sawah	Bengkok Pensiunan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	86.840.000	
110	Tanah Pertanian lainnya	3357	31/12/1979	Kedungjangan RT 03 RW 03 Kel Purwosari Kec Mijen	125	30/04/2007	125	Pertanian		6.714.000	
111	Tanah Pertanian lainnya	5857	31/12/1979	Sodong RT 01 RW 02 Kel Purwosari Kec Mijen	145	07/07/2007	145	Tanah Pertanian		14.642.500	
112	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	200000	12/02/2013	Jatisari RT 001, RT 003, RT 005 RW 001 Kelurahan jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang	3997,3998, & 3999	01/04/2019	3997,3998,& 3999	pemakaman	fasum fasos pt.karyadeka alam lestari - Penilaian - 50.14.14.00	60.000.000.000	
113	Tanah Usaha	13749	30/12/1976	Dk. Dawung, RT 04 RW 02	HP 20	30/04/2007	HP 20	Pertanian	Bengkok Kebayan 3 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	164.050.000	
114	Tanah Usaha	5209	30/12/1976	Gerung, RT 03 RW 01 Karangmalang	HP 023	30/04/2007	HP 023	Pertanian	Bengkok Bondodeso - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	94.350.000	
115	Tanah Usaha	8231	30/12/1976	Kebondalem, RT 01 RW 03 Karangmalang	HP 0005	30/04/2007	HP 0005	Pertanian	Bengkok Kebayan 4 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	231.200.000	
116	Tanah Usaha	1790	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 62		HP 62	Sawah	Ex Bengkok an. Ngarimin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	35.800.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
117	Tanah Usaha	4217	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.134	HP 149	07/06/2007	HP 149	Sawah	Ex bengkok an Massadaqoh - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	84.340.000	
118	Tanah Usaha	4031	30/12/1992	RT 01 RW 03 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 13	30/04/2007	HP 13	Pertanian	Mutasi dari Kel. Jatibarang Lama - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	209.600.000	
119	Tanah Usaha	1432	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.111	HP 57	30/04/2007	HP 57	Sawah	Ex bengkok an. Rohmad Bin Sipan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	28.640.000	
120	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	2542	24/12/2021	kel bubakan kec. mijen bsb village				sarana peribadatan	fasum fasos PT HIJAU CIPTA HARMONI - bsb village	508.400.000	
121	Tanah Usaha	2291	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02	HP 07	30/04/2007	HP 07	Pertanian	Ex Bengkok Carik - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	45.820.000	
122	Tanah Usaha	2151	30/12/1993	Jatisari RT 002 RW 004 Kelurahab Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang	HP 04	04/06/2007	HP 04	Pertanian	Ex Bengkok Sawah Bondodeso - Ex-Bengkok - 50.14.14.00	58.077.000	
123	Tanah Usaha	2064	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 98	30/04/2007	HP 98	Sawah	Ex Bengkok an. Suyudi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	41.280.000	
124	Tanah Usaha	3394	30/12/1976	Kelurahan Cangkiran RT 01 RW 04	HP 0004	30/04/2007	HP 0004	Sawah	Pertanian - Ex-Bengkok - 50.14.07.00	65.450.000	
125	Tanah Usaha	898	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 64		HP 64	Sawah	Ex Bengkok an. Biyati - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	17.960.000	
126	Tanah Usaha	1187	30/12/1992	RT 04 RW 02 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 25	30/04/2007	HP 25	Pertanian	Mutasi dari Kel. Jatibarang Lama - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	95.443.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
127	Tanah Usaha	1150	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.45	HP 157	07/06/2007	HP 157	Sawah	Ex Bengkok an. Kusmiyati - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	23.000.000	
128	Tanah Usaha	950	30/12/1976	RT 01 RW 01 Kel. Mijen	HP 12		HP 12	Sawah	Dilelang - Ex-Bengkok - 50.14.10.00	9.500.000	
129	Tanah Usaha	1669	30/12/1976	Wonolopo, RT 04 RW 05 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang/ P.85	HP 021	30/04/2007	HP 021	Pertanian	Ex Tanah Desa - Lain-Lain - 50.14.04.00	45.063.000	
130	Tanah Usaha	2549	30/12/1976	Purwosari, RT 03 RW 05/P.143	HP 67	24/04/2007	HP 67	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	50.980.000	
131	Tanah Usaha	207	31/12/2008	Purwosari Rt.03/Rw.05	2107	22/10/1998	2107	Pertanian	Tanah tersebut Belum dibalik nama dan masih akte jual beli - APBD - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	5.589.000	
132	Tanah Usaha	5866	30/12/1976	Bugeng RT 01 RW 03 Kel. Bubakan	HP 00014	30/04/2007	HP 00014	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	118.000.000	
133	Tanah Usaha	5225	30/12/1993	Jatisari RT 002 RW 004 Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang	HP 03	04/06/2007	HP 03	Pertanian	Ex Bengkok Sawah Kami Tuo - Ex-Bengkok - 50.14.14.00	141.075.000	
134	Tanah Usaha	930	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 04 / P.33	HP 144	07/06/2007	HP 144	Sawah	Ex bengkok an. Warsidi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	18.600.000	
135	Tanah Usaha	11632	30/12/1976	Duduhan RT 02 RW 02 Jatibarang	HP 12	30/04/2007	HP 12	Pertanian	Ex Bengkok Bondo Deso - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	232.640.000	
136	Tanah Usaha	10051	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 03 / P. 131	Hp 46	30/04/2007	Hp 46	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	201.020.000	
137	Tanah Usaha	2735	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03 / P.132 b	HP 95	30/04/2007	HP 95	Sawah	Ex Bengkok an Masrukhin - Ex-	54.700.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									Bengkok - 50.14.11.00		
138	Tanah Usaha	3587	30/12/1996	Purwosari, RT 04 RW 02/P.77	HP 25		HP 25	Sawah	Ex bengkok an. Suliyah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	71.740.000	
139	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	290	30/12/2001	Cangkiran, RT 04 RW 02	HP 00009	30/04/2007	HP 00009	Rumah Dinas Lurah	Tanah Negara - Lain-Lain - 50.14.07.00	30.000.000	
140	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	7505	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penelusuran 2023)	4.503.000.000	
141	Tanah Usaha	1194	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 15	30/04/2007	HP 15	Sawah	Ex bengkok an. Sudarno Bin Wakimin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	23.880.000	
142	Tanah Usaha	4550	30/12/1977	Duwet RT 003 RW 002 Tambangan	HP 008	08/06/2007	HP 008	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	191.250.000	
143	Tanah Usaha	3606	30/12/1977	Tambangan, RT 04 RW 01 Kel. Tambangan Kec. Mijen	HP 015	08/06/2007	HP 015	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	156.800.000	
144	Tanah Usaha	2181	30/12/1976	Wonolopo, RT 01 RW 05 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.42	HP 6		HP 6	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	58.887.000	
145	Tanah Usaha	4743	30/12/1977	Sidorejo RT 003 RW 003 Kel. Tambangan	HP 006	08/06/2007	HP 006	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	221.000.000	
146	Tanah Usaha	2161	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 01/P.119	HP 101	30/04/2007	HP 101	Sawah	Ex bengkok an. Ngariman/Sawar - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	43.220.000	
147	Tanah Usaha	1449	30/12/2007	Purwosari, RT 03 RW 05	HP 33	30/04/2007	HP 33	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	38.525.000	
148	Tanah Usaha	3500	30/12/1976	Polaman RT 01 RW 01 (1A/S.III)	HM 197		HM 197	JSDF	Ex Amanat - Ex-Bengkok -	59.250.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									50.14.13.00		
149	Tanah Usaha	5650	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 02 (51/S.II), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 8	30/04/2007	HP 8	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	160.388.000	
150	Tanah Usaha	2696	30/12/1976	RT 02 RW 05 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 15	30/04/2007	HP 15	Pertanian JSDF	Asli Aset Kel. Kedungpane - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	50.105.000	
151	Tanah Usaha	4190	30/12/1993	JL. PESANTREN	HP 10	06/08/2007	HP 10	Pertanian	Ex Kel. Kedungpani - Ex-Bengkok - 50.14.15.00	116.204.000	
152	Tanah Usaha	3711	30/12/1992	RT 04 RW 02 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 26	30/04/2007	HP 26	Pertanian	Mutasi dari Kel. Jatibarang Lama - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	112.413.000	
153	Tanah Usaha	5119	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.111	56	30/04/2007	56	Sawah	Ex Bengkok An. Sunadi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	100.238.000	
154	Tanah Usaha	2064	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 38/98	30/04/2007	HP 38/98	Sawah	Ex Bengkok an Mashudi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	41.280.000	
155	Tanah Usaha	12410	30/12/1976	Kelurahan Cangkiran RT 04 RW 02	HP 00013	30/04/2007	HP 00013	Sawah	Pertanian - Ex-Bengkok - 50.14.07.00	120.000.000	
156	Tanah Usaha	9474	30/12/1976	Kel. Cangkiran RT 02 RW 01	HP 00015	30/04/2007	HP 00015	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.07.00	400.000.000	
157	Tanah Usaha	794	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02 Jatibarang	HP 06	30/04/2007	HP 06	Pertanian	Ex Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	15.880.000	
158	Tanah Usaha	5588	30/12/1976	Sawah Cengon RW 01	HP 00011	30/04/2007	HP 00011	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	274.992.000	
159	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2511	31/12/1979	Jl. Raya Tambangan RT 01 RW 02 Kel Tambangan Kec Mijen	19	07/04/2007	19	Kantor Kel Tambangan		50.220.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
160	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	259	30/12/1994	Sapen, RT 04 RW 02 Wonoplumbon	HP 05	30/04/2007	HP 05	Balai Kelurahan Wonoplumbon	Tukar Menukar - Lain-Lain - 50.14.06.00	12.432.000	
161	Tanah Lapangan Sepak Bola	8150	30/12/1976	RT 02 RW 05 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 18 dan HP 27	30/04/2007	HP 18 dan HP 27	Lapangan(Luas 7847m2)&Balai RW.V (Luas 303)	Asli Aset Kel. Kedungpane - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	186.392.000	
162	Tanah Untuk Makam Umum	5571	30/12/1993	Jatisari RT 002 RW 002 Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang				Pemakaman Umum	- Ex-Bengkok - 50.14.14.00	150.417.000	
163	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	702	30/12/1976	Wonolopo, RT 03 RW 07 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.94	HP 17		HP 17	Balai Kelurahan Wonolopo	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	18.954.000	
164	Tanah Usaha	4964	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (3/S.III), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 23	07/06/2007	HP 23	JSDF	Mutasi dari Kel. Karangmalang - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	24.675.000	
165	Tanah Usaha	1424	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.42	HP 43	30/04/2008	HP 43	Sawah	Asal usul aset : Tukar Menukar - Lain-Lain - 50.14.11.00	28.480.000	
166	Tanah Usaha	2242	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01	HP 155	07/06/2007	HP 155	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	44.480.000	
167	Tanah Usaha	3754	30/12/1976	Polaman, RT 03 RW 01 (6A/D.IV)				Pertanian	Ex Amanat - Ex-Bengkok - 50.14.13.00(Penelusuran 2023)	95.727.000	
168	Tanah Usaha	9327	30/12/2001	RT 03 RW 01 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 11	30/04/2007	HP 11	Pertanian	Tukar Guling / Sk. Walikota No. 143/245 - Lain-Lain - 50.14.02.00	88.948.850	
169	Tanah Usaha	11312	30/12/1976	Krajan, RT 02 RW 02 Karangmalang	HP 0019	30/04/2007	HP 0019	Pertanian	Bengkok Kebayan 1 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	151.300.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
170	Tanah Usaha	4339	30/12/1976	Kebondalem, RT 01 RW 03 Karangmalang	HP 00007	30/04/2007	HP 00007	Pertanian	Bengkok Bondodeso - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	69.700.000	
171	Tanah Usaha	3300	30/12/1976	RT 01 RW 02 Kel. Mijen	HP 7		HP 7	Sawah	1350 M2 rencana utk Ktr Kel, 1950 M2 dilelang - Ex-Bengkok - 50.14.10.00	84.150.000	
172	Tanah Usaha	2383	30/12/1976	Wonolopo, RT 01 RW 05 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang/P.42	HP 7		HP 7	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	64.341.000	
173	Tanah Usaha	6834	30/12/1976	Kelurahan Cangkiran RT 02 RW 04	HP 14	30/04/2007	HP 14	Sawah	Pertanian - Ex-Bengkok - 50.14.07.00	107.100.000	
174	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	200	30/12/1976	RT 01 RW 01 Kel. Mijen	HP 9		HP 9	Sawah	Balai Kelurahan Mijen	85.000.000	
175	Tanah Usaha	2445	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.42	HP 40	30/04/2007	HP 40	Sawah	Asal usul aset : Tukar Menukar - Lain-Lain - 50.14.11.00	48.900.000	
176	Tanah Usaha	1799	30/12/2007	Purwosari, RT 03 RW 05 / P. 159				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	44.975.000	
177	Tanah Usaha	3287	30/12/1976	Tlogo, RT 01 RW 03 Jatibarang	HP 10	30/04/2007	HP 10	Pertanian	Ex Bengkok Bondo Deso - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	65.740.000	
178	Tanah Usaha	592	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.129	HP 117	30/04/2007	HP 117	Sawah	Ex Bengkok an. Rusmi Binti Mertodimejo - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	11.840.000	
179	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	640	31/12/1979	Sidorejo RT 003 RW 003 Kel. Tambangan	12	06/08/2007	12	Balai RW	Balai RW RT 03 RW 03 Tambangan	6.400.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
180	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1470	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 01 (24/D.I)	HP 05	18/04/2007	HP 05	Kantor Kelurahan, Rumah Dinas, dan Balai Kelurahan	Tanah Desa - Lain-Lain - 50.14.13.00	103.000.000	
181	Tanah Usaha	2612	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 23	30/04/2007	HP 23	Sawah	Ex bengkok an. Sri Utami - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	52.240.000	
182	Tanah Usaha	3019	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.42	HP 104	30/04/2007	HP 104	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	60.380.000	
183	Tanah Usaha	1664	25/12/2014	RT 3 RW 5					PS 154C 2209 KLAS D II - Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	59.904.000	
184	Tanah Usaha	1484	30/12/1976	Purwosari, RT 03 RW 03/P.150	HP 112	30/04/2007	HP 112	Sawah	Bengkok Kamituo - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	29.280.000	
185	Tanah Usaha	2051	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.111	HP 85	11/04/2007	HP 85	Sawah	Ex bengkok an. Kasmir Amat Dullah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	41.020.000	
186	Tanah Usaha	3434	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.51	HP 41		HP 41	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	68.680.000	
187	Tanah Usaha	3850	30/12/1997	Purwosari, RT 01 RW. 04				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	77.000.000	
188	Tanah Usaha	1537	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 119	30/04/2007	HP 119	Sawah	Ex bengkok an. Rubadi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	30.740.000	
189	Tanah Usaha	8811	30/12/1976	RT 02 RW 03 Kel. Mijen	HP 01	30/04/2007	HP 01	Pertanian JSDF	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.10.00	277.050.000	
190	Tanah Usaha	977	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.128	HP 16	30/04/2007	HP 16	Sawah	Ex Bengkok an. Saban Bin	19.540.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									Suwardi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00		
191	Tanah Usaha	5227	30/12/2007	Purwosari, RT 02 RW 02/ P.81	HP 174	04/09/2009	HP 174	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	132.000.000	
192	Tanah Usaha	1262	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03 / P.129 b	HP 21	30/04/2007	HP 21	Sawah	Ex bengkok an. Mukhaerodin bin Amir - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	25.240.000	
193	Tanah Usaha	1254	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03 / P.128	HP 45	30/04/2007	HP 45	Sawah	Ex bengkok an. Mustakim Kirman - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	25.080.000	
194	Tanah Usaha	23612	30/12/1981	Wonoyoso, RT 01 RW 04 Wonoplumbon	HP 06	30/04/2007	HP 06	Pertanian	Dilelang - Ex-Bengkok - 50.14.06.00	850.032.000	
195	Tanah Usaha	2488	30/12/1977	Sidorejo RT 003 RW 003 Kel. Tambangan Kec. Mijen	HP 001	08/06/2007	HP 001	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	44.000.000	
196	Tanah Usaha	11936	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 05 / P.55 Kel. Wonolopo Kec. Mijen	HP 035	30/04/2007	HP 035	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	322.272.000	
197	Tanah Usaha	9815	30/12/1976	Kelurahan Cangkiran RT 03 RW 03	HP 0007	30/04/2007	HP 0007	Sawah	Pertanian - Ex-Bengkok - 50.14.07.00	219.300.000	
198	Tanah Usaha	16810	30/12/1976	Kelurahan Cangkiran RT 01 RW 01	HP 0010	30/04/2007	HP 0010	Sawah	Pertanian - Ex-Bengkok - 50.14.07.00	160.000.000	
199	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	580	30/12/2011	Kelurahan Pesantren, RT 02 RW 01	HP 03	30/04/2007	HP 03	Rumah Dinas	karena ada masalah tukar guling - Lain-Lain - 50.14.15.00	143.000.000	
200	Tanah Usaha	34848	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 05/P. 147	HP 165	24/08/2007	HP 165	Sawah	Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	696.960.000	
201	Tanah Usaha	2504	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 03	HP 93	30/04/2007	HP 93	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	50.080.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
202	Tanah Usaha	900	30/12/1997	Purwosari, RT 03 RW 01				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penelusuran 2023)	18.000.000	
203	Tanah Usaha	4210	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 03 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.60	HP 027	30/04/2007	HP 027	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	113.670.000	
204	Tanah Usaha	1430	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 05 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.50	HP 034	30/04/2007	HP 034	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	38.610.000	
205	Tanah Usaha	9080	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 01 (29/S.I), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 14	30/04/2007	HP 14	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	237.150.000	
206	Tanah Usaha	2061	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (31 B/S.III), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 19	30/04/2007	HP 19	Pertanian	Ex Amanat - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	52.658.000	
207	Tanah Usaha	9049	30/12/1993	Jatisari RT 002 RW 004 Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang	HP 2	04/06/2007	HP 2	Pertanian	Ex Bengkok Sawah Modin - Ex-Bengkok - 50.14.14.00	244.323.000	
208	Tanah Usaha	4345	30/12/1976	Setukung, RT 04 RW 02 Jatibarang	HP 15	30/04/2007	HP 15	Pertanian	Ex Bengkok Kamituwa - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	86.900.000	
209	Tanah Usaha	2260	30/12/1977	Duwet RT 003 RW 002 Kel. Tambangan Kec. Mijen	HP 007	08/06/2007	HP 007	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	56.000.000	
210	Tanah Usaha	8191	30/12/1976	Wonolopo, RT 03 RW 07 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang/ P.94	HP 9		HP 9	Kantor Kel. Wonolopo	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	221.157.000	
211	Tanah Usaha	7512	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02	HP 18	30/04/2007	HP 18	Pertanian	Ex Bengkok Carik - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	150.240.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
212	Tanah Usaha	6502	30/12/1976	Sawah Cengon RT 01 RW 01	HP 00018	30/04/2007	HP 00018	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	522.340.000	
213	Tanah Usaha	3162	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 02/P.60	HP 69	30/04/2007	HP 69	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	63.240.000	
214	Tanah Usaha	4522	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	162	07/06/2007	162	Sawah	Ex Bengkok an. Taslim - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	100.844.000	
215	Tanah Usaha	2005	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 42	30/04/2008	HP 42	Sawah	Ex Bengkok an Turyanto - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	40.100.000	
216	Tanah Lapangan Sepak Bola	10607	30/12/1976	Wonolopo, RT 01 RW 01 / P.II Kel. Wonolopo Kec. Mijen	HP 044	24/08/2007	HP 044	Lapangan Sepak Bola	Ex Tanah Negara - Lain-Lain - 50.14.04.00	286.389.000	
217	Tanah Lapangan Sepak Bola	9950	30/12/1983	Bubakan RT 01 RW 01				Lapangan Sepak Bola	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	1.492.500.000	
218	Tanah Lapangan Sepak Bola	8014	30/12/1976	Purwosari RT 02 RW 01				Lapangan Sepak Bola	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	160.280.000	
219	Tanah Usaha	3405	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 04 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.13	Hp 031	30/04/2007	Hp 031	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	91.935.000	
220	Tanah Usaha	2104	30/12/1976	Wonolopo, RT 01 RW 05 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.42	HP 037	30/04/2007	HP 037	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	56.800.000	
221	Tanah Usaha	3313	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 08 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.93	HP 013	30/04/2007	HP 013	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	89.431.000	
222	Tanah Usaha	5305	30/12/1976	Polaman RT 01 RW 01 (1A/S.III) Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 26	07/06/2007	HP 26	Pertanian	Ex Amanat - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	267.360.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
223	Tanah Usaha	1880	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (56/S.III)				JSDF	Ex Sidakarya - Ex-Bengkok - 50.14.13.00(Penel usuran 2023)	47.940.000	
224	Tanah Usaha	5380	30/12/1976	Polaman RT 01 RW 01 (2/SIII)	HP 22	07/06/2007	HP 22	JSDF	Mutasi dari Kel. Karangmalang - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	181.050.000	
225	Tanah Usaha	2264	30/12/1976	Polaman RT 01 RW 01 (1A/S.III)	HP 30	07/06/2007	HP 30	JSDF	Ex Kaperda - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	81.473.000	
226	Tanah Usaha	5935	30/12/1976	RT 02 RW 05 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 23	30/04/2007	HP 23	Pertanian JSDF	Asli Aset Kel. Kedungpane - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	160.336.000	
227	Tanah Usaha	2170	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.111	HP 127	30/04/2007	HP 127	Sawah	Ex Bengkok an. Moh Tosin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	43.400.000	
228	Tanah Usaha	14085	30/12/1976	Dk. Sebumi, RT 01 RW 01 Karangmalang	HP 0016	30/04/2007	HP 0016	Pertanian	Bengkok Kamituwo - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	249.050.000	
229	Tanah Usaha	40897	30/12/1976	Kel. Cangkiran RT 03 RW 03	HP 00020	05/12/2007	HP 00020	Sawah	Pertanian - Ex-Bengkok - 50.14.07.00	300.000.000	
230	Tanah Usaha	350	30/12/1976	RT 01 RW 02 Kel. Mijen	HP 8		HP 8	Sawah	Dilelang - Ex-Bengkok - 50.14.10.00	8.925.000	
231	Tanah Usaha	2824	30/12/1976	Gerung, RT 03 RW 01 Karangmalang	HP 22	30/04/2007	HP 22	Pertanian	Bengkok Bondodeso - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	85.000.000	
232	Tanah Usaha	2017	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 b	HP 39	30/04/2007	HP 39	Sawah	Ex Bengkok an Sugiyarti - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	40.340.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
233	Tanah Usaha	13961	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 147	07/06/2007	HP 147	Sawah	Ex bengkok an. Muh Suwargadi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	279.220.000	
234	Tanah Usaha	7396	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02 Jatibarang	HP 21	30/04/2007	HP 21	Pertanian	Ex Bengkok Modin - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	147.920.000	
235	Tanah Usaha	4719	30/12/1976	Purwosari, RT 01 RW 03/P.95	HP 004	30/04/2007	HP 004	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	139.100.000	
236	Tanah Usaha	4928	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.111	HP 5	30/04/2007	HP 5	Sawah	Ex Bengkok an Sakban Bin Karmani - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	98.560.000	
237	Tanah Usaha	3133	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 04 / P.23	HP 18	30/04/2007	HP 18	Sawah	Ex Bengkok an Mashudi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	62.680.000	
238	Tanah Usaha	4391	30/12/1976	Kebondalem, RT 01 RW 03 Karangmalang	HP 00006	30/04/2007	HP 00006	Pertanian	Bengkok Kebayan 2 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	209.100.000	
239	Tanah Usaha	3385	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03 /P.132 b	HP 87	30/04/2007	HP 87	Sawah	Ex Bengkok an. Kasanrejo Sokip/Pasijan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	67.160.000	
240	Tanah Usaha	5186	30/12/1976	Setukung, RT 04 RW 02 Jatibarang	HP 16	30/04/2007	HP 16	Pertanian	Ex Bengkok Kebayan - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	103.720.000	
241	Tanah Usaha	14500	30/12/1976	Kuncen RT 01 RW 03 Kel. Bubakan	HP 00023	30/04/2007	HP 00023	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	720.000.000	
242	Tanah Usaha	1440	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03 / P. 132 b	HP 91	30/04/2007	HP 91	Sawah	Ex Bengkok Martiah Bin Karjono - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	28.800.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
243	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	652	30/12/1976	Purwosari RT 02 RW 01	HP 47	30/04/2007	HP 47	Kantor Kelurahan Purwosari	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	13.040.000	
244	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1036	30/12/1993	Jl. RM. Hadi Sobeno S. RT 001 RW 001 Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang	HP 01	18/04/2007	HP 01	Kantor Kel, Rumah Dinas Lurah, dan Balai Pertemuan	PT. Tata Anyar - Lain-Lain - 50.14.14.00	1.172.608.000	
245	Tanah Usaha	4284	30/12/1976	Kebondalem, RT 01 RW 03 Karangmalang	HP 012	30/04/2007	HP 012	Pertanian	Bengkok Bondodeso - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	116.450.000	
246	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	948	30/12/1994	Sapen, RT 08 RW 01 Wonoplumbon	HP 07	30/04/2007	HP 07	Kantor Kelurahan Wonoplumbon	Hasil tukar menukar dg Persil 36 - Lain-Lain - 50.14.06.00	45.504.000	
247	Tanah Usaha	3344	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.134	HP 36	30/04/2007	HP 36	Sawah	Ex Bengkok an. Suntrioko - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	66.880.000	
248	Tanah Usaha	2138	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.134	HP 100/148	30/04/2007	HP 100/148	Sawah	Ex Bengkok an. Kasiati Iskak - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	42.760.000	
249	Tanah Usaha	1633	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 122	30/04/2007	HP 122	Sawah	Ex bengkok an. Jasiyah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	32.660.000	
250	Tanah Usaha	3581	30/12/1992	RT 04 RW 02 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 20	30/04/2007	HP 20	Pertanian	Mutasi dari kel. Jatibarang Lama - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	69.649.000	
251	Tanah Usaha	887	30/12/1993	Jatisari RT 002 RW 004 Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang	HP 05	04/06/2007	HP 05	Pertanian	Ex Bengkok Sawah Intilan - Ex-Bengkok - 50.14.14.00	23.949.000	
252	Tanah Usaha	3565	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 03 / P.119	HP 17	30/04/2007	HP 17	Sawah	Ex bengkok an Umar Dulmanan - Ex-Bengkok -	71.300.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									50.14.11.00		
253	Tanah Usaha	2420	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.134	HP 138	30/04/2007	HP 138	Sawah	Ex Bengkok an. Rohmani - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	48.400.000	
254	Tanah Usaha	20611	30/12/1976	RT 02 RW 05 Kel. Kedungpane Kec. Mijen				Pertanian JSDF	Asli aset Kel. Kedungpane - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	388.817.000	
255	Tanah Usaha	2249	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 10	30/04/2007	HP 10	Sawah	Ex bengkok an. Jasiyah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	44.980.000	
256	Tanah Usaha	3585	30/12/1976	Tlogo, RT 01 RW 03 Jatibarang	HP 09	30/04/2007	HP 09	Pertanian	Ex Bengkok Bondo Deso - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	71.700.000	
257	Tanah Usaha	396	30/12/1976	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.94	HP 9	30/04/2007	HP 9	Sawah	Bengkok Pensiunan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	7.900.000	
258	Tanah Usaha	1361	30/12/1996	Purwosari, RT 04 RW 02/P.75b	HP 159	07/06/2007	HP 159	Sawah	Ex bengkok an Aminah Samin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	27.220.000	
259	Tanah Usaha	1215	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.111	HP 96	30/04/2007	HP 96	Sawah	Ex bengkok an. Kasmir Amat Dullah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	24.300.000	
260	Tanah Usaha	4406	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03 / P.119	HP 110	30/04/2007	HP 110	Sawah	Ex bengkok an. Sulasno Mukmin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	88.120.000	
261	Tanah Usaha	733	31/12/2008	Purwosari Rt.03/RW.05	2108	22/10/1998	2108	Tanah Pertanian	Tanah tersebut Belum dibalik nama dan masih	19.791.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									akte jual beli - APBD - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)		
262	Tanah Usaha	2042	30/12/1976	Wonolopo, RT 01 RW 04 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang /P.53	HP 032	30/04/2007	HP 032	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	55.134.000	
263	Tanah Usaha	2280	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 03 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.69	HP 028	30/04/2007	HP 028	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	61.560.000	
264	Tanah Usaha	4556	30/12/1976	Polaman RT 01 RW 01 (16/SIII), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 27	07/06/2007	HP 27	JSDF	Ex Kaperda - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	62.220.000	
265	Tanah Usaha	1620	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02 Jatibarang	HP 13	30/04/2007	HP 13	Pertanian	Ex Bengkok Kamituwa - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	32.400.000	
266	Tanah Usaha	2994	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.111	92	30/04/2007	92	Sawah	Ex Bengkok an. Mariyati - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	59.880.000	
267	Tanah Usaha	1452	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 03 / P.119	158	07/06/2007	158	Sawah	Ex Bengkok an. Jumeno - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	29.040.000	
268	Tanah Usaha	2249	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 03 / P.113	HP 10		HP 10	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penel usuran 2023)	45.880.000	
269	Tanah Usaha	2986	30/12/1976	Purwosari, RT 05 RW 03/P.96	HP 142	07/06/2007	HP 142	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	59.720.000	
270	Tanah Usaha	5635	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 01 / P.82	HP 19	30/04/2007	HP 19	Sawah	Ex bengkok an. Kasbollah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	112.700.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
271	Tanah Usaha	3373	30/12/1977	Sidorejo RT 003 RW 003 Kel. Tambangan	HP 018	08/06/2007	HP 018	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	6.732.000	
272	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	403	30/12/1976	Kel. Mijen, RT 02 RW 01				Rumah Dinas Lurah Mijen	Tukar Menukar - Lain-Lain - 50.14.10.00	40.300.000	
273	Tanah Kaveling (dst)	902	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	631.100.000	
274	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemua n	2006	30/12/1976	Purwosari RT 02 RW 01/P.97				Balai Kelurahan Purwosari	Bengkok Kebayan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	40.120.000	
275	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemua n	554	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 09 / P.8 Kel. Wonolopo Kec. Mijen	HP 038	29/05/2007	HP 038	Balai Pertemuan	Ex Tanah Desa - Lain-Lain - 50.14.04.00	14.958.000	
276	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4250	30/12/1976	Duduhan, RT 02 RW 02 Jatibarang				Kantor Kelurahan & Rumah Dinas	Ex Bondo Deso - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	85.000.000	
277	Tanah Pertanian lainnya	1780	31/12/1979	Durenan RT 003 RW 003 Kel. Tambangan Kec. Mijen	24	09/02/2009	24	Lahan pertanian		17.800.000	
278	Tanah Lapangan Sepak Bola	2850	30/12/1976	Purwosari RT 02 RW 05	HP 168	12/09/2007	HP 168	Lapangan RW V	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	57.000.000	
279	Tanah Lapangan Sepak Bola	13846	30/12/1976	Kel. Cangkiran RT 04 RW 02	HP 00017	05/12/2007	HP 00017	Lapangan Olah Raga	- Ex-Bengkok - 50.14.07.00	181.827.000	
280	Tanah Untuk Makam Umum	8090	30/12/1993	Jatisari RT 001 RW 001 Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang				Pemakaman Umum	PT. Tata Anyar - Lain-Lain - 50.14.14.00	1.035.520.0 00	
281	Tanah Perkebunan Lainnya	13200	30/12/1977	Sidorejo RT 003 RW 003 Kel. Tambangan	HP 014	08/06/2007	HP 014	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	219.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
282	Tanah Lapangan Sepak Bola	6535	30/12/1994	Sapen, RT 08 RW 01 Wonoplumbon	HP 17		HP 17	Lapangan Sepak Bola	Tanah Negara - Lain-Lain - 50.14.06.00	313.680.000	
283	Tanah Tandus lainnya	8915	30/12/2011	Kel Wonoplumbon, Kec Mijen	HP 12	30/04/2007	HP 12	Tanah Erosi	Tanah Ex Bengkok Carik	89.150.000	
284	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1714	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penelusuran 2023)	1.199.500.000	
285	Tanah Usaha	2274	30/12/1976	Tlogo, RT 01 RW 03 Jatibarang	HP 11	30/04/2007	HP 11	Pertanian	Ex Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	45.480.000	
286	Tanah Usaha	1604	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 03 / P.116	HP 13	30/04/2007	HP 13	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	32.800.000	
287	Tanah Usaha	5069	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 01 / P.111 (Blok 12)	HP 58	30/04/2007	HP 58	Sawah	Ex Bengkok an. Turwan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	100.138.000	
288	Tanah Usaha	1655	16/12/2014	RT 2 Rw1	HP 0002	28/11/2005	HP 0002		Ps 91 SIII - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	59.580.000	
289	Tanah Usaha	1666	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.45	HP 24	30/04/2007	HP 24	Sawah	Ex Bengkok an. Mujiati - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	33.320.000	
290	Tanah Usaha	9512	30/12/1976	Wonolopo, RT 01 RW 04 / P.54 Kel. Wonolopo Kec. Mijen				Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	256.824.000	
291	Tanah Usaha	7850	30/12/1976	Polaman, RT 03 RW 02, Kel. Polaman, Kec. Mijen (1A/D.III)	HP 11	30/04/2007	HP 11	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.13.00	222.750.000	
292	Tanah Usaha	3000	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 03 (1A/S.IV), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 4	28/11/2005	HP 4	Pertanian	Tri Cahya Purnama - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	144.000.000	
293	Tanah Usaha	14827	30/12/1976	Purwosari, RT 06 RW 02/P.50	HP 81/82	19/04/2007	HP 81/82	Sawah	Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	296.540.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
294	Tanah Usaha	395	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 03 / P.91.a	HP 09	30/11/2007	HP 09	Sawah	Ex Bengkok an Zainudin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	7.900.000	
295	Tanah Usaha	2393	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 29	30/04/2007	HP 29	Sawah	Ex Bengkok an. Darmanto - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	47.860.000	
296	Tanah Usaha	3041	30/12/1992	RT 01 RW 02 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 24	30/04/2007	HP 24	Pertanian	Mutasi dari Kel. Jatibarang Lama - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	67.779.000	
297	Tanah Usaha	9015	30/12/1976	Dk. Sebumi, RT 01 RW 01 Karangmalang	HP 0021	30/04/2007	HP 0021	Pertanian	Bengkok Kebayan 1 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	5.300.000	
298	Tanah Usaha	2804	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.134b	HP 150	07/06/2007	HP 150	Sawah	Ex Bengkok an. Ikhwan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	56.080.000	
299	Tanah Usaha	1802	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.51	HP 134	11/04/2007	HP 134	Sawah	Ex bengkok an. Salam - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	37.840.000	
300	Tanah Usaha	3467	30/12/2007	Purwosari, RT 03 RW 05 / P. 159				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penelusuran 2023)	86.675.000	
301	Tanah Usaha	487	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02 Jatibarang	HP 23	30/04/2007	HP 23	Pertanian	Ex Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	9.740.000	
302	Tanah Usaha	429	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 11	30/04/2007	HP 11	Sawah	Ex Bengkok an. Jumaeri Bin Slamet - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	85.800.000	
303	Tanah Usaha	2337	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 04 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.67	HP 029	30/04/2007	HP 029	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	63.099.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
304	Tanah Usaha	2442	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03 / P.115	HP 80	11/04/2007	HP 80	Sawah	Ex Bengkok an. Saman - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	67.700.000	
305	Tanah Usaha	16231	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 02/P.55	HP 107	30/04/2007	HP 107	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	324.620.000	
306	Tanah Usaha	2290	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03 / P.119	HP 54	30/04/2007	HP 54	Sawah	Ex bengkok an. Nursiyati Ramidi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	45.800.000	
307	Tanah Usaha	2138	30/12/1996	Purwosari, RT 01 RW 05	HP 148/100	07/06/2007	HP 148/100	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	42.760.000	
308	Tanah Usaha	628	30/12/1976	Wonolopo, RT 04 RW 05 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang/ P.85	HP 019	30/04/2007	HP 019	Pertanian	Ex Tanah Desa - Lain-Lain - 50.14.04.00	16.956.000	
309	Tanah Usaha	5935	30/12/1976	Kebondalem, RT 01 RW 03 Karangmalang	HP 013	30/04/2007	HP 013	Pertanian	Bengkok Kamituwo 3 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	16.900.000	
310	Tanah Usaha	3673	30/12/1976	Kebondalem, RT 01 RW 03 Karangmalang	HP 00008	30/04/2007	HP 00008	Pertanian	Bengkok Bondodeso - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	57.800.000	
311	Tanah Usaha	3667	30/12/1977	Sidorejo RT 003 RW 003 Kel. Tambangan Kec. Mijen	HP 016	08/06/2007	HP 016	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	221.000.000	
312	Tanah Usaha	15434	30/12/1976	Dk. Gerung, RT 03 RW 01 Karangmalang	HP 017	30/04/2007	HP 017	Pertanian	Bengkok Kamituwo 2 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	287.300.000	
313	Tanah Usaha	2724	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 05 / P.111 (Blok 12)	HP 74	29/05/2007	HP 74	Sawah	Ex Bengkok an. Sukarni - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	54.480.000	
314	Tanah Usaha	1445	30/12/1996	Purwosari, RT 06 RW 02 / P.42	HP 105	30/04/2007	HP 105	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	28.900.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
315	Tanah Usaha	5900	30/12/1977	Tambangan RT 002 RW 001	HP 005	08/06/2007	HP 005	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	225.250.000	
316	Tanah Usaha	6930	30/12/1977	Genuk RT 001 RW 002 Kel. Tambangan Kec. Mijen	HP 009	08/06/2007	HP 009	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	310.250.000	
317	Tanah Usaha	392	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.125	HP 32	30/04/2007	HP 32	Sawah	Ex bengkok an. Ngarpini - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	7.840.000	
318	Tanah Usaha	19685	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 01 (30/S/II)	HP 17	30/04/2007	HP 17	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	551.043.000	
319	Tanah Usaha	11285	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 02 (49/S.II), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 9	30/04/2007	HP 9	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	674.195.000	
320	Tanah Usaha	1212	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 03 / P.117				Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00(Penelusuran 2023)	24.240.000	
321	Tanah Usaha	3508	30/12/2007	Purwosari, RT 04 RW 02 / P.81	HP 173	21/08/2009	HP 173	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	87.700.000	
322	Tanah Usaha	9727	30/12/1976	Dk. Gedungan RT 04 RW 01 Karangmalang	HP 27	30/04/2007	HP 27	Pertanian	Bengkok Kebayan 2 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	6.800.000	
323	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	946	30/12/2011	Kel Ngadirgo RT 03 RW 09	HP 01	18/04/2007	HP 01	Kantor Kelurahan, Rumah Dinas, dan Balai Kelurahan	Pengabungan 3 bidang - Ex-Bengkok - 50.14.12.00	1.424.600.000	
324	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	561	30/12/1976	Cangkiran, RT 04 RW 02	HP 00008	30/04/2007	HP 00008	Kantor Kelurahan Cangkiran	Tanah Negara - Lain-Lain - 50.14.07.00	56.000.000	
325	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	441	30/12/1979	Cangkiran, RT 04 RW 02	HP 00011	30/04/2007	HP 00011	Balai Kelurahan Cangkiran	Tanah Negara - Lain-Lain - 50.14.07.00	44.000.000	
326	Tanah Pertanian lainnya	8592	31/12/1979	Sodong RT 05 RW 02 Kel Purwosari Kec Mijen masuk ke RW	90	30/04/2007	90	Pertanian		17.184.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				3							
327	Tanah Pertanian lainnya	2700	31/12/1979	Block S0te RT 02 RW 02 Kel Purwosari Kec Mijen	172	19/08/2009	172	Pertanian		5.400.000	
328	Tanah Kebun Induk	15315	30/12/1976	Purwosari, RT 05 RW. 03/P.124	HP 71	27/04/2007	HP 71	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	306.300.000	
329	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	409	30/12/1976	Wonolopo, RT 03 RW 07 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.95	HP 010	30/04/2007	HP 010	Kantor Kelurahan Wonolopo	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	11.043.000	
330	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	229	30/12/1976	Jl. RM Hadi Soebeno S RT 01 RW 02 Kel. Mijen				Kantor Kelurahan Mijen	- Ex-Bengkok - 50.14.10.00	22.900.000	
331	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	124	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	80.600.000	
332	Tanah Usaha	9579	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 03/P.95	HP 49	30/04/2007	HP 49	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	282.300.000	
333	Tanah Usaha	5179	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 01 / P.81	HP 61	30/01/2007	HP 61	Sawah	Ex Bengkok an. Kawan dan Ismail - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	103.580.000	
334	Tanah Usaha	3542	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03 / P.128	HP 66	30/04/2007	HP 66	Sawah	Ex bengkok an. Mutiah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	70.840.000	
335	Tanah Usaha	2342	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03 / P.132 b	HP 139	30/04/2007	HP 139	Sawah	Ex Bengkok an. Jumini Kasiran - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	46.840.000	
336	Tanah Usaha	4080	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (16/S.II)	HM 313		HM 313	Pertanian	Ex Sidakarya - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	246.166.000	
337	Tanah Usaha	5438	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (6A/S.IV)				Pertanian	Ex Padidaya - Ex-Bengkok - 50.14.13.00(Penel	108.760.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									usuran 2023)		
338	Tanah Usaha	1491	30/12/1981	Wonoyoso, RT 01 RW 04 Wonoplumbon	HP 13	30/04/2007	HP 13	Pertanian	Dilelang - Ex-Bengkok - 50.14.06.00	53.676.000	
339	Tanah Usaha	883	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 26	30/04/2007	HP 26	Sawah	Ex Bengkok an. Nastain - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	17.660.000	
340	Tanah Usaha	1026	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.134	HP 94	30/04/2007	HP 94	Sawah	Ex Bengkok an. Slamet Bin Sukiman - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	20.520.000	
341	Tanah Usaha	2208	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.134	HP 27/72	30/04/2007	HP 27/72	Sawah	Ex Bengkok an. Kasmi Bin Kasah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	44.160.000	
342	Tanah Usaha	4641	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 20	30/04/2007	HP 20	Sawah	Ex bengkok an. Sukrisno - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	92.820.000	
343	Tanah Usaha	2549	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 143	07/06/2007	HP 143	Sawah	Ex bengkok an. Rusmi/Sawar - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	50.980.000	
344	Tanah Usaha	275	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P.132 b	HP 35	30/04/2007	HP 35	Sawah	Ex Bengkok an Jumiah Muslich - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	5.500.000	
345	Tanah Usaha	3094	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/ P.134	HP 152	07/06/2007	HP 152	Sawah	Ex Bengkok an. Rusmiyar Bin Misbah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	61.880.000	
346	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	798	30/12/1993	Kelurahan Pesantren, RT 02 RW 01 Kec. Mijen	HP 04	30/04/2007	HP 04	Kantor Kelurahan Pesantren	Jual beli - APBD - 50.14.15.00	50.274.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
347	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	638	30/12/1976	Wonolopo, RT 03 RW 07 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.95	HP 8		HP 8	Rumah Dinas	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	17.226.000	
348	Tanah Bangunan Kandang Hewan	6581	30/12/1976	Purwosari, RT 06 RW 02/P.43	HP 48	30/04/2007	HP 48	Pertanian	Bengkok Bondo Deso - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	131.620.000	
349	Tanah Bangunan Gudang	544	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	364.500.000	
350	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1021	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	643.200.000	
351	Tanah Usaha	12921	30/12/1976	Batok, RT 04 RW 02 Kel. Bubakan	HP 0006 dan HP 00025	30/04/2007	HP 0006 dan HP 00025	Pertanian	HP 06 luas 10569m2, HP 25 luas 2352m2 - Ex-Bengkok - 50.14.08.00	883.200.000	
352	Tanah Usaha	22569	30/12/2011	Sidorejo RT 003 RW 003 Kel. Tambangan Kec. Mijen	HP 023	05/12/2007	HP 023	Pertanian	Pengabungan Bengkok Sekdes Luas 10390m2 & 800m2 - Ex-Bengkok - 50.14.03.00	209.400.000	
353	Tanah Usaha	9369	30/12/1976	Kelurahan Cangkiran RT 04 RW 02	HP 000012	30/04/2007	HP 000012	Sawah	Pertanian - Ex-Bengkok - 50.14.07.00	100.000.000	
354	Tanah Usaha	12147	30/12/2001	RT 01 RW 03 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 8	28/10/2005	HP 8	Pertanian	Tukar Guling / SK Walikota No. 143/245 - Lain-Lain - 50.14.02.00	86.742.000	
355	Tanah Usaha	2337	15/12/2014	RT1 RW2	HP 00160	07/06/2007	HP 00160		PS 36 S III - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	84.132.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
356	Tanah Usaha	31017	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02	HP 28		HP 28	Pertanian	Ex Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	620.340.000	
357	Tanah Usaha	10049	30/12/1976	Bugeng RT 01 RW 03 Kel. Bubakan	HP 00012	30/04/2007	HP 00012	Tanah Tegalan	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	191.540.000	
358	Tanah Usaha	2103	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.111	HP 137	30/04/2007	HP 137	Sawah	Ex bengkok an. Mutiah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	42.060.000	
359	Tanah Usaha	3875	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 3	30/04/2007	HP 3	Sawah	Ex bengkok an Sudarno Bin Wakimin - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	77.500.000	
360	Tanah Usaha	1400	30/12/1976	RT 01 RW 02 Kel. Mijen				Sawah	Dilelang - Ex-Bengkok - 50.14.10.00	35.700.000	
361	Tanah Usaha	16939	30/12/1976	Purwosari RT 05 RW 03/P. 115	HP 14	30/04/2007	HP 14	Sawah	Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	338.780.000	
362	Tanah Usaha	2505	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 01 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.8	HP 014	30/04/2007	HP 014	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	160.320.000	
363	Tanah Usaha	1884	30/12/1976	Wonolopo, RT 01 RW 05 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang /P.42	HP 016	30/04/2007	HP 016	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	50.868.000	
364	Tanah Usaha	3350	30/12/1976	RT 01 RW 01 Kel. Mijen	HP 11		HP 11	Sawah	Dilelang - Ex-Bengkok - 50.14.10.00	85.425.000	
365	Tanah Usaha	35031	30/12/2008	Sidorejo, RT 03 RW 03 Kel. Tambangan Kec. Mijen					Sudah sertifikat masih pemilik lama - Ex-Bengkok - 50.14.03.00	2.200.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
366	Tanah Usaha	920	30/12/1996	Purwosari, RT 04 RW 02/P.77	HP 88		HP 88	Sawah	Ex bengkok an. Sarmidi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	18.400.000	
367	Tanah Usaha	642	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 01 (26/S.I), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 24	07/06/2007	HP 24	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	157.872.000	
368	Tanah Usaha	3825	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (1A/SIII)	HM 227		HM 227	JSDF	- Ex-Bengkok - 50.14.13.00	36.420.000	
369	Tanah Usaha	2377	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 02 (33/S.II), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 13	30/04/2007	HP 13	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	38.000.000	
370	Tanah Usaha	2689	30/12/1976	RT 02 RW 05 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 28	30/04/2007	HP 28	Pertanian JSDF	Asli Aset Kedungpane - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	49.974.000	
371	Tanah Usaha	1363	30/12/1976	RT 02 RW 05 Kel. Kedungpane Kec. Mijen	HP 14	30/04/2007	HP 14	Pertanian JSDF	Asli aset Kel. Kedungpane - Ex-Bengkok - 50.14.02.00	50.608.000	
372	Tanah Usaha	7230	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02 Jatibarang	HP 19	30/04/2007	HP 19	Pertanian	Ex Bengkok Kebayan - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	144.600.000	
373	Tanah Usaha	1645	30/12/1976	Bubakan RT 01 RW 01	HP 00019	30/04/2007	HP 00019	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	123.000.000	
374	Tanah Usaha	1515	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.118	HP 121	30/04/2007	HP 121	Sawah	Ex Bengkok an Salam - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	30.300.000	
375	Tanah Usaha	5510	30/12/1993	RT 02 RW 05 Kel. Ngadirgo				Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.12.00	281.040.000	
376	Tanah Usaha	400	30/12/1976	Dk. Gedungan RT 04 RW 01 Karangmalang					Bengkok Kebayan 2 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	8.650.000	
377	Tanah Usaha	4276	30/12/1976	Dk. Gerung, RT 03 RW 01 Karangmalang	HP 25	30/04/2007	HP 25	Pertanian	Bengkok Bondodeso - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	71.400.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
378	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	1778	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penelusuran 2023)	1.102.100.000	
379	Tanah Usaha	3027	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 7	30/04/2007	HP 7	Sawah	Ex Bengkok an. Subadi Bin Sapar - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	60.540.000	
380	Tanah Usaha	2987	30/12/1996	Purwosari, RT 04 RW 02/P.26	HP 55/160	30/04/2007	HP 55/160	Sawah	Ex Bengkok an. Pasini - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	46.740.000	
381	Tanah Usaha	40576	30/12/1976	Karangmalang, RT 01 RW 02	HP 15	30/04/2007	HP 15	Pertanian	Bengkok Lurah - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	1.167.050.000	
382	Tanah Usaha	7531	30/12/1993	Delem/No Persil 123 Kel. Pesantren	HP 5	30/04/2007	HP 5	Pertanian	Eks Kel. Gondoriyo - Ex-Bengkok - 50.14.15.00	253.598.000	
383	Tanah Usaha	4913	30/12/1993	JL. PESANTREN / No Persil 13 Kel. Pesantren	HP 07	30/04/2007	HP 07	Pertanian	Ex. Kel. Kedungpani - Ex-Bengkok - 50.14.15.00	85.935.000	
384	Tanah Usaha	13178	30/12/1976	Kelurahan Cangkiran RT 01 RW 01	HP 00016	30/04/2007	HP 00016	Sawah	Pertanian - Ex-Bengkok - 50.14.07.00	170.000.000	
385	Tanah Usaha	1442	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 01 / P.89	HP 102	30/04/2007	HP 102	Sawah	Ex bengkok an. Sumilah/Sukaemi - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	28.840.000	
386	Tanah Usaha	2465	30/12/1996	Purwosari, RT 04 RW 02/P.77	HP 68		HP 68	Sawah	Ex Bengkok an Mariyah Sarbini - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	49.300.000	
387	Tanah Pertanian lainnya	2785	31/12/1979	Block S0te RT 02 RW 02 Kel Purwosari Kec Mijen	116	30/04/2007	116	Pertanian		5.570.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
388	Tanah Lapangan Taman lainnya	4162	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	3.121.500.000	
389	Tanah Lapangan Sepak Bola	7681	30/12/2011	Kelurahan Polaman RT 01 RW 01	HP 12	30/04/2007	HP 12	Untuk Pertanian	Pengabungan 2 bidang luas 1900m2 dan 5738m2 - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	125.250.000	
390	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	811	30/12/1986	Bubakan RT 01 RW 01	HP 00010	30/04/2007	HP 00010	Masjid	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	121.650.000	
391	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	4032	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	4.636.900.000	
392	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	2823	30/12/1976	Purwosari RT 01 RW 02/P.55	HP 171	05/12/2007	HP 171	Masjid	Bengkok Kamituo - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	56.460.000	
393	Tanah Bangunan Fumigasi/Sterilisasi	620	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	403.100.000	
394	Tanah Usaha	8694	30/12/1976	Sidodadi, RT 01 RW 02 Jatibarang	HP 17	30/04/2007	HP 17	Pertanian	Ex Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	173.880.000	
395	Tanah Usaha	11453	30/12/1976	Purwosari, RT 03 RW 05/P.142	HP 156	07/06/2007	HP 156	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	226.340.000	
396	Tanah Usaha	2239	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 163	07/06/2007	HP 163	Sawah	Ex Bengkok an Sumari - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	44.780.000	
397	Tanah Usaha	5239	30/12/1976	RT 01 RW 02 Kel. Mijen	HP 02	30/04/2007	HP 02	Sawah	Dilelang - Ex-Bengkok - 50.14.10.00	236.300.000	
398	Tanah Usaha	4047	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03 / P.128	HP 75	29/05/2007	HP 75	Sawah	Ex bengkok an Umiyatini - Ex-Bengkok -	80.940.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									50.14.11.00		
399	Tanah Usaha	2245	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03 / P.129	HP 22	30/04/2007	HP 22	Sawah	Ex Bengkok an. Amrondi Rasam - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	44.900.000	
400	Tanah Usaha	3103	30/12/1976	Kel. Cangkiran RT 03 RW 03 Kec. Mijen	HP 0006	30/04/2007	HP 0006	Sawah	Pertanian - Ex-Bengkok - 50.14.07.00	65.450.000	
401	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	604	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penelusuran 2023)	724.500.000	
402	Tanah Usaha	5691	30/12/1976	Purwosari, RT 03 RW 03/P.144	HP 111	30/04/2007	HP 111	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	113.820.000	
403	Tanah Usaha	1163	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 05 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang /P.48	HP 036	30/04/2007	HP 036	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	31.401.000	
404	Tanah Usaha	6954	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 03 (55/S.II), Kel. Polaman, Kec.Mijen	HP 21	07/06/2007	HP 21	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	181.794.000	
405	Tanah Usaha	2500	30/12/1976	Polaman, RT 01 RW 01 (31B/S.III)	HM 237		HM 237	Pertanian	Ex Standart - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	50.000.000	
406	Tanah Usaha	2066	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 01, Kel. Polaman, Kec. Polaman	HP 16	30/04/2007	HP 16	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	229.628.000	
407	Tanah Usaha	921	30/12/1976	Polaman RT 01 RW 01 (1A/S.III)	HP 25	07/06/2007	HP 25	JSDF	Ex Sidakarya - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	41.132.000	
408	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	3310	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penelusuran 2023)	3.309.700.000	
409	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottag	8813	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel	5.728.800.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
	e								usuran 2023)		
410	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1895	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	1.326.600.000	
411	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	69000	20/02/2013	Jl. RM Hadisoebeno Sosrowardoyo RT 004 RW 001 Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang	3996	01/04/2019	3996	perniagaan	fasum fasos pt.karyadeka alam lestari - - 50.14.14.00	86.250.000.000	
412	Tanah Usaha	4636	30/12/1976	Bubakan RT 03 RW 01	HP 00020	30/04/2007	HP 00020	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	104.000.000	
413	Tanah Usaha	3822	30/12/1976	Kebondalem, RT 01 RW 03 Karangmalang	HP 11	30/04/2007	HP 11	Pertanian	Bengkok Kamituwo 3 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	2.000.000	
414	Tanah Usaha	1109	30/12/1980	RT 04 RW 01 Kel. Ngadirgo				Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.12.00	76.000.000	
415	Tanah Usaha	4172	30/12/1976	Karangmalang, RT 01 RW 02	HP 0026	05/12/2007	HP 0026	Kantor Kel	Bengkok Carik Persil 55/SII - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	4.526.250.000	
416	Tanah Usaha	46064	30/12/1980	RT 03 RW 02 Kel. Ngadirgo				Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.12.00	2.955.450.000	
417	Tanah Usaha	4187	30/12/1976	Wonolopo, RT 02 RW 01 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.10	HP 015	30/04/2007	HP 015	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	267.968.000	
418	Tanah Usaha	4314	30/12/1976	RT 01 RW 01 Kel. Mijen	HP 03	30/04/2007	HP 03	Balai Kelurahan	- Ex-Bengkok - 50.14.10.00	103.275.000	
419	Tanah Usaha	1436	30/12/1976	Kebondalem, RT 01 RW 03 Karangmalang	HP 14	30/04/2007	HP 14	Pertanian	Bengkok Kamituwo 3 - Ex-Bengkok - 50.14.09.00	5.950.000	
420	Tanah Usaha	4000	30/12/1993	RT 03 RW 05 Kel.				Pertanian	- Ex-Bengkok -	204.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Ngadirgo					50.14.12.00		
421	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	7984	30/12/2014	Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) Jatisari Mijen					penilaian 2014 - Fasum Fasos - 50.14.01.00(Penel usuran 2023)	7.584.600.000	
422	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	50185	30/12/1977	Tambangan RT 002 RW 001 Kel. Tambangan Kec. Mijen	HP 022	05/12/2007	HP 022	Kantor Kelurahan dan Rumah Dinas	- Ex-Bengkok - 50.14.03.00	1.074.611.900	
423	Tanah Usaha	3300	30/12/1993	JL. PESANTREN	HP 09	06/08/2007	HP 09	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.15.00	144.925.000	
424	Tanah Usaha	2033	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03 / P.128	HP 63		HP 63	Sawah	Ex bengkok an. Mardiyah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	40.660.000	
425	Tanah Usaha	3572	30/12/1976	Bugeng RT 01 RW 03 Kel. Bubakan	HP 00016	30/04/2007	HP 00016	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	90.000.000	
426	Tanah Usaha	2339	30/12/1996	Purwosari, RT 02 RW 01 / P.91 a	HP 97	30/04/2007	HP 97	Sawah	Ex Bengkok an. Sukiyah - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	46.780.000	
427	Tanah Usaha	1132	30/12/1976	Wonolopo, RT 01 RW 04 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang / P.29	HP 033	30/04/2007	HP 033	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.04.00	30.564.000	
428	Tanah Usaha	4206	30/12/1981	Wonoyoso, RT 01 RW 04 Wonoplumbon Kecamatan Mijen	HP 09	30/04/2007	HP 09	Pertanian	Dilelang - Ex-Bengkok - 50.14.06.00	151.416.000	
429	Tanah Usaha	20000	30/12/2006	Jati Ombo RT 01 RW 01 Kel. Bubakan	HP 5	19/01/2006	HP 5	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.08.00	720.000.000	
430	Tanah Usaha	541	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 01 (32/S.II)	HP 10	30/04/2007	HP 10	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	29.325.000	
431	Tanah Usaha	7965	30/12/1976	Polaman, RT 02 RW 02 (52/S.II), Kel. Polaman, Kec. Mijen	HP 6	30/04/2007	HP 6	Pertanian	Bengkok Murni - Ex-Bengkok - 50.14.13.00	176.945.000	
432	Tanah Usaha	3452	30/12/1993	JL. PESANTREN	HP 8	06/08/2007	HP 8	Pertanian	- Ex-Bengkok -	96.671.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
									50.14.15.00		
433	Tanah Usaha	6314	30/12/1976	Setukung, RT 04 RW 02 Jatibarang	HP 22	30/04/2007	HP 22	Pertanian	Ex Bengkok Bekel - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	126.280.000	
434	Tanah Usaha	4676	30/12/1976	Bubakan RT 02 RW 01	HP 00017 dan HP 00026	30/04/2007	HP 00017 dan HP 00026	Pertanian,	HP 00017 luas 4676 m2, HP 00026 luas 2345m2 - Ex-Bengkok - 50.14.08.00	149.000.000	
435	Tanah Usaha	2402	30/12/1996	Purwosari, RT 03 RW 03/P. 134	HP 154	07/06/2007	HP 154	Sawah	Ex Bengkok an. Sochib Bin Temu - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	48.040.000	
436	Tanah Usaha	2297	30/12/1996	Purwosari, RT 05 RW 03/P.119	HP 108	30/04/2007	HP 108	Sawah	Ex bengkok an. Akhmat Zaenuri - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	45.940.000	
437	Tanah Usaha	6043	30/12/1976	Purwosari RT 02 RW 05/P.136	HP 06	30/04/2007	HP 06	Sawah	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	120.860.000	
438	Tanah Usaha	5189	30/12/1976	Setukung, RT 04 RW 02 Jatibarang	HP 25	30/04/2007	HP 25	Pertanian	Ex Bengkok Kebayan - Ex-Bengkok - 50.14.05.00	103.780.000	
439	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	186	30/12/1976	Mijen, RT 02 RW 01				Gedung TK Pertiwi	- Ex-Bengkok - 50.14.10.00	18.600.000	
440	Tanah Kebun Induk	15236	30/12/1976	Purwosari, RT 05 RW 03/P.113	HP 146	07/06/2007	HP 146	Pertanian	- Ex-Bengkok - 50.14.11.00	304.720.000	
441	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4243	30/12/1976	RT 01 RW 01 Kel. Mijen	HP 10		HP 10	Sawah	Rencana Untuk Kantor Kelurahan Mijen	176.200.000	
442	Tanah Lapangan Sepak Bola	8220	30/12/1976	Purwosari RT 02 RW 01/P.92	HP 166	24/08/2007	HP 166	Lapangan Oah Rga	Bengkok Kebayan - Ex-Bengkok - 50.14.11.00	160.280.000	

Tabel 2.9
Gedung dan Bangunan Kecamatan Mijen

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	453	Rt.02/ Rw. 5 Kel. Jatisari Kec. Mijen Semarang			Pembelian	90.000.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	5.95	JL. RM. Hadi Soebeno S No. 122 Mijen Kota Semarang			Pembelian	204.977.000
3	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	50	jl Rm Hadi soebeno			Pembelian	48.391.000
4	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	640	Jl. RM Hadi Soebeno S RT 004 RW 001 Kel.Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang			Pembelian	874.779.451
5	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	450	Depan Masjid Jami Jatisari			Pembelian	145.051.167
6	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	120	RT 06 RW 05 Kel. Kedungpane			Pembelian	55.155.967
7	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	120	RT 06 RW 04 Kel. Wonolopo			Pembelian	55.318.617
8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	120	Jl. RM Hadi Soebeno S, No.122			Pembelian	209.142.000
9	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	50	Jl. RM Hadi Soebeno S, No.122			Pembelian	159.321.000
10	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	120	Kel. Kedungpane			Pembelian	89.251.000
11	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	120	RW 01 Kel. Bubakan			Pembelian	169.777.000
12	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	52	Sodong RT 01 RW 02 Kel. Purwosari			Pembelian	146.460.333
13	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	72	RW 01 Kel. Purwosari			Pembelian	101.277.333
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	100	Polaman, RT 02 RW 01			PEMBELIAN	394.210.384
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	120	Cangkiran, RT 04 RW 02			PEMBELIAN	168.215.532
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	224	Jl. RM. Hadi Soebeno S. No.122 Kec. MIjen Kota Semarang			PEMBELIAN	1.060.957.977

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	229	Mijen, RT 01 RW 02			PEMBELIAN	443.267.566
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	165	Bubakan, RT 01 RW 01			PEMBELIAN	470.207.101
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	144	Wonolopo, RT 03 RW 07 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen			PEMBELIAN	352.553.188
20	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	194	Jl. RM. Hadi Soebeno S. No. 122 Kec. Mijen Semarang			PEMBELIAN	273.878.250
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	795	Kedungpane, RT 02 RW 02			PEMBELIAN	519.427.682
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	110	Dk. Gilisari, RT 02 RW 01 Kel. Purwosari			PEMBELIAN	315.236.966
23	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	144	Jl. RM Hadi Soebeno S Kel. Tambangan, RT 02 RW 01			PEMBELIAN	1.050.881.744
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	132	Karangmalang, RT 01 RW 02			PEMBELIAN	423.648.052
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	168	Jl. RM. Hadi Soebeno S RT 004 RW 001 Kel. Jatiisari Kec. Mijen Kota Semarang			PEMBELIAN	968.349.353
26	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	120	Jalan Duduhan Kel. Jatibarang			PEMBELIAN	1.271.980.125
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	140	Pesantren, RT 02 RW 01			PEMBELIAN	287.302.212
28	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kurang Baik	54	Karangmalang, RT 01 RW 02			PEMBELIAN	4.000.000
29	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	48	Mijen, RT 02 RW 01			PEMBELIAN	25.000.000
30	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	795	Kedungpane, RT 02 RW 02			PEMBELIAN	45.000.000
31	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	48	Kedungpane, RT 02 RW 03			PEMBELIAN	30.000.000
32	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik		Jl. RM Hadi Soebeno S (Kantor Kecamatan Baru)			PEMBELIAN	19.825.000
33	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	35	Jl. RM. Hadi Soebeno S. No. 122 Kec. Mijen Semarang			PEMBELIAN	30.240.000
34	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Kurang Baik	65	Dk. Gilisari, RT 02 RW 02 Kel. Purwosari			PEMBELIAN	20.000.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
35	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	120	Kelurahan Polaman, RT 02 RW 01			PEMBELIAN	187.614.000
36	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	240	Wonolopo, RT 02 RW 09 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen			PEMBELIAN	14.958.000
37	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	240	Wonolopo, RT 03 RW 07 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen			PEMBELIAN	402.526.935
38	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	300	Cangkiran, RT 04 RW 02			PEMBELIAN	260.532.359
39	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	240	Karangmalang, RT 01 RW 02			PEMBELIAN	156.965.749
40	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	220	Jl. RM. Hadi Soebeno S. No. 122 Kec. Mijen Semarang			PEMBELIAN	383.623.500
41	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	120	Dk. Gilisari, RT 02 RW 01 Kel. Purwosari			PEMBELIAN	243.339.062
42	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	180	Bubakan, RT 01 RW 01			PEMBELIAN	34.781.500
43	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	140	Dk. Gilisari, RT 02 RW 01 Kel. Purwosari			PEMBELIAN	388.122.733
44	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	640	Kedungpane, RT 02 RW 02			PEMBELIAN	125.000.000
45	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	144	Dk. Sapen, RT 04 RW 02			PEMBELIAN	451.807.197
46	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	170	Jl. RM Hadi Soebeno S RT 004 RW 001 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang			PEMBELIAN	134.915.000
47	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	303	Kedungpane, RT 02 RW 05			PEMBELIAN	45.000.000
48	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	300	Mijen, RT 01 RW 01			PEMBELIAN	384.941.626
49	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	264	Kelurahan Tambangan RT 02 RW 01			PEMBELIAN	415.432.973
50	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	90	Jl. RM. Hadi Soebeno S. No. 122 Kec. Mijen Semarang			PEMBELIAN	124.291.700
51	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	150	Ngadirgo, RT 03 RW 09 Kelurahan Ngadirgo Kec. Mijen			PEMBELIAN	17.000.000
52	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	36	Jalan Duduhan Kel. Jatibarang			PEMBELIAN	45.000.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
53	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	45	Cangkiran, RT 04 RW 02			PEMBELIAN	10.320.000
54	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	35	Kelurahan Polaman, RT 02 RW 01			PEMBELIAN	45.000.000
55	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	265	Kedungpane, RT 02 RW 02			PEMBELIAN	69.669.800
56	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	84	Jl. RM. Hadi Soebeno, Kel. Tambangan, RT. 02 RW. 01			PEMBELIAN	75.000.000
57	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	45	Dk. Sapen, RT 08 RW 01			PEMBELIAN	45.000.000
58	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	48	Bubakan, RT 01 RW 01			PEMBELIAN	45.000.000
59	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	45	Karangmalang, RT 01 RW 02			PEMBELIAN	45.000.000
60	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	45	Mijen, RT 02 RW 01			PEMBELIAN	45.000.000
61	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	45	Dk. Gilisari, RT 02 RW 01 Kel. Purwosari			PEMBELIAN	90.599.930
62	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	84	Wonolopo, RT 02 RW 07			PEMBELIAN	45.000.000
63	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	56	Pesantren, RT 02 RW 01			PEMBELIAN	64.725.700
64	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Baik	45	Jl. RM Hadi Soebeno S RT 004 RW 001 Kel. Jatisari Kec. Mijen			PEMBELIAN	75.000.000
65	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	36	Jl. RM Hadi Soebeno No. 122 Mijen Kota Semarang			PEMBELIAN	14.870.000
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1124	Jl.RM Hadi Soebono S. No.122 Semarang			PEMBELIAN	4.179.950.500
67	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	90	kampung tematik kewirausahaan RW 08 Cangkiran			Pembelian	77.268.422
68	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	42.29	Kampung tematik Kewirausahaan RW.08 Cangkiran			Pembelian	61.786.905
69	Bangunan Menara Pengawas Lain-lain (dst)	Baik	3	sekretek rt.02 rw.03 karang malang			Pembelian	54.906.518
70	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Baik	1600	Gg 2 Sodong RT 001 RW 002			Hibah	174.549.427

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
71	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	62.06	rw.02 kel purwosari			Pembelian	150.664.007
72	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	20	Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen			Pembelian	81.806.226
73	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik	72.22	rejosari RT 03 RW 03 kelurahan wonolopo kecamatan mijen			Pembelian	100.957.493
74	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	226	Jl.Wonoplumbon			PEMBELIAN	932.297.952

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, per Desember 2024

II.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Mijen Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Mijen Kota Semarang

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Pada dokumen Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Kecamatan Mijen di bidang kewilayahan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
1.	**Indikator Tujuan :**															
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	90,27	91,00	91,5	92,00	85,00	90,27	91,30	92,32	93,00	100,00%	100,00%	100,33%	100,90%	101,09%
2.	**Indikator Sasaran :**															
a.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	100,00%	-	-
b.	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	dengan Standar PATEN															
c.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80,00%	95,00%	97,00%	98,00 %	99,00%	80,00%	95,00%	84,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,60%	102,04%	101,01%
d.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	43,00%	43,00%	-	-	N/A	43,00%	62.04%	-	-	N/A	100,00%	144,28%	-	-
e.	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	81,68%	83,36%	85,04%	86,72%	-	81,68%	83,36%	97,48%	99,64%	-	100,00%	100,00%	114,63%	114,90%
f.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	-	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	87,00%	58,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	64,44%	108,70%	105,26%
3.	**Indikator Program :**															
a.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
b.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
c.	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
d.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
e.	Persentase Kinerja administrasi dan	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	pelaporan Keuangan SKPD															
f.	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
g.	Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
h.	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
i.	Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan RT	88,00%	100,00%	-	-	-	72,37%	100,00%	-	-	-	82,24%	100,00%	-	-	-
j.	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	219 Bidang Tanah	218 Bidang Tanah	-	-	-	218 Bidang Tanah	197 Bidang Tanah	-	-	-	99,54%	90,37%	-	-	-
k.	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	3 Kelurahan	6 Kelurahan	-	-	-	N/A	6 Kelurahan	-	-	-	N/A	100,00%	-	-	-
l.	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan Kelurahan)	806 Kegiatan	806 Kegiatan	-	-	-	804 Kegiatan	745 Kegiatan	-	-	-	99,75%	92,43%	-	-	-
m.	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	53,00%	55,00%	-	-	-	51,16%	55,00%	-	-	-	96,53%	100,00%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
n.	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	93,81%	95,00%	-	-	-	92,53%	94,53%	-	-	-	98.63%	99,51%	-	-	-
o.	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	99,04%	99,50%	-	-	-	98,64%	98,30%	-	-	-	99,60%	98,79%	-	-	-
p.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar PATEN	1 Kelurahan	13 Kelurahan	-	-	-	1 Kelurahan	13 Kelurahan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
q.	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	5.255 Pelayanan	5.780 Pelayanan	-	-	-	7.532 Pelayanan	7.625 Pelayanan -	-	-	-	143,33%	131,92%	-	-	-
r.	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	14 Kelurahan	14 Kelurahan	-	-	-	14 Kelurahan	14 Kelurahan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
s.	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
t.	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan	100,00%	100,00%	-	-	-	71,78%	79,65%	-	-	-	71,78%	79,65%	-	-	-
u.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi	-	85,00%	91,00%	92,00%	93,00%	-	85,00%	91,3%	92,32%	93,00%	-	100,00%	100,33%	100,34%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	informasi (SPBE)															
v.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	95,00%	97,00 %	98,00%	99,00%	-	95,00%	99,64%	100,00%	100,00%	-	100,00%	102,72%	102,04%	101,01%
w.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	0,00%	10,00%	15,00%	20,00%	-	0,00%	62,04%	44,05%	55,56%	-	0,00%	620,40%	293,66%	277,80%
x.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	85,00%	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,44%	86,67%	108,69%	105,26%
4.	**Indikator Lainnya**															
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	N/A	90,21%	-	-	-	-	90,21%	-	-	-	N/A	100,00%	-	-	-
b.	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	-	-	11,14 %	10,52%	9,9%	-	-	5,89%	5,89%	7,42%	-	-	189,13%	178,61%	133,42%
c.	Nilai AKIP	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	74,71	74,71	72,06	74,80	75,55	106,73%	105,22%	100,08%	102,46%	102,09%

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Mijen Kota Semarang yaitu membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.11
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	90,27	91,30	92,32	93,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

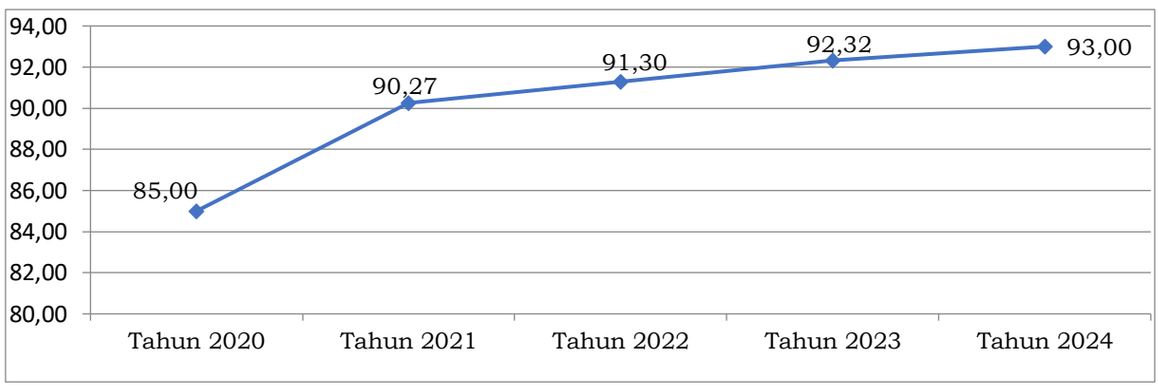

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

Gambar 2.5
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

Selain dari Indeks Kepuasan Masyarakat, kinerja pelayanan Kecamatan Mijen juga dilihat dari Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.12
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	N/A	90,00%	100,00%	100,32%	93,00%

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

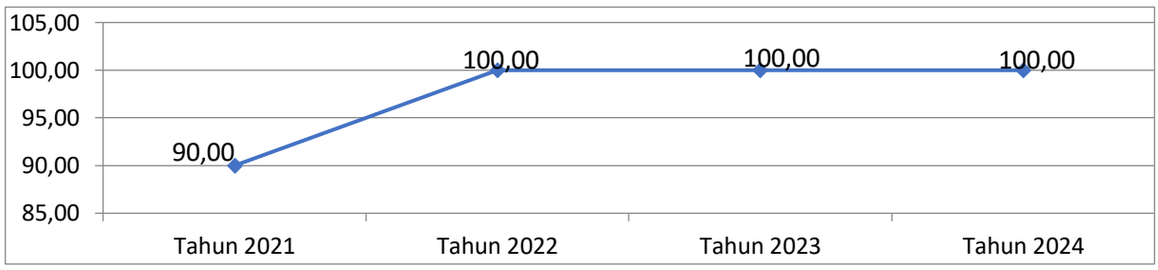

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

Gambar 2.6
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020-2024

Sedangkan untuk Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.13
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80,00%	95,00%	84,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

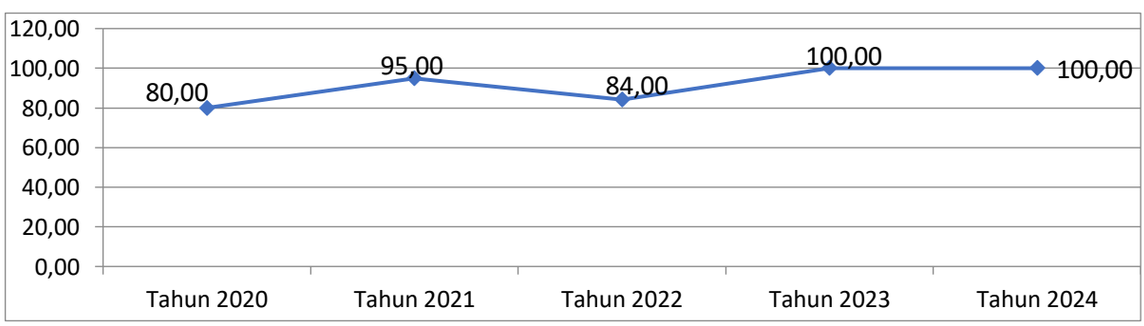

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

Gambar 2.7
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

Kinerja pelayanan Kecamatan Mijen, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.14
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum	-	81,68%	83,36%	97,48%	99,64%

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

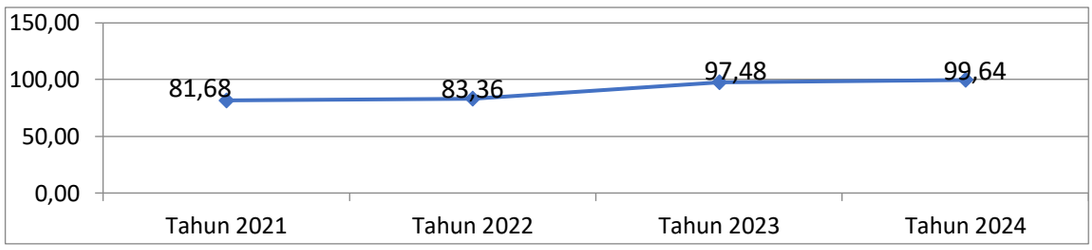

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

Gambar 2.8
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

Sedangkan untuk Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.15
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	-	87,00%	58,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

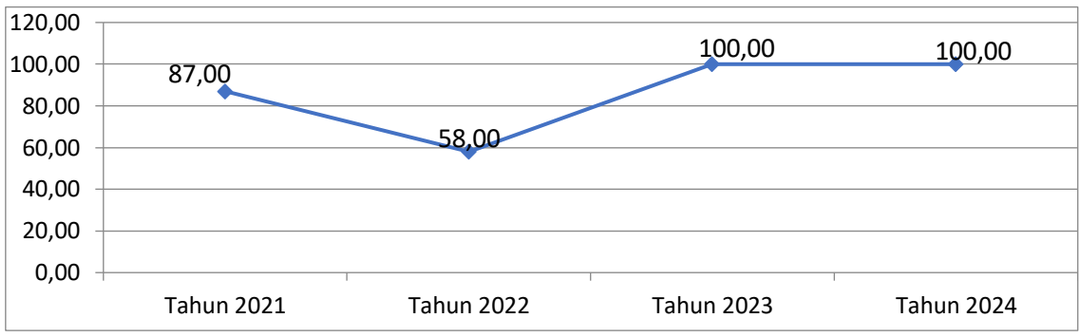

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

Gambar 2.9
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Mijen Kota Semarang

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2020-2024 Kecamatan Mijen Kota Semarang menerima total alokasi anggaran sebesar Rp 207.326.867.298,- dengan realisasi sebesar Rp 200.606.514.064,- (96,76 %). Secara rinci anggaran beserta realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaksanaan Urusan
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	JUMLAH BELANJA	**23.062.404.000**	**48.890.547.858**	**49.499.791.592**	**53.752.380.499**	**55.184.147.349**	**21.868.004.088**	**45.778.205.450**	**48.481.361.443**	**51.812.309.473**	**54.534.637.698**	**94.82**	**93.63**	**97.94**	**6.39**	**98.82**	**31.14**	**31.85**
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	356.884.000	0	0	0	0	345.486.900	0	0	0	0	96,81	0	0	0	0	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	192.390.000	0	0	0	0	192.390.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	35.338.000	0	0	0	0	33.674.000	0	0	0	0	95,29	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	10.937.329.000	0	0	0	0	10.618.138.910	0	0	0	0	97,08	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.396.515.000	0	0	0	0	8.538.577.963	0	0	0	0	90,87	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.379.638.000	0	0	0	0	1.376.826.315	0	0	0	0	99,80	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	188.180.000	0	0	0	0	186.780.000	0	0	0	0	99,26	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	568.480.000	0	0	0	0	568.480.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Intensifikasi PAD	7.650.000	0	0	0	0	7.650.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	19.814.867.858	19.211.257.246	21.124.563.333	22.857.119.985	0	18.478.002.849	18.713.610.397	19.909.384.049	21.292.443.279	0	93,25	97,41	94,25	93,15	5,04	4,87

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	9.298.040.000	3.372.493.934	3.667.107.640	3.998.318.392	0	8.506.972.347	3.212.751.586	3.406.421.700	3.787.978.144	0	91,49	95,26	92,89	94,74	-15,32	-15,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	19.520.640.000	26.885.565.412	28.819.187.526	32.137.163.636	0	18.544.273.054	26.528.008.460	28.375.035.224	29.277.230.275	0	95,00	98,67	98,46	91,10	18,81	17,73
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	257.000.000	16.735.000	50.830.000	110.863.636	0	248.957.200	14.400.000	35.800.000	102.186.000	0	96,87	86,05	70,43	92,17	76,12	79,94
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	13.740.000	90.692.000	79.000.000	0	0	12.591.000	85.668.500	74.800.000	0	0	91,64	94,46	94,68	273,58	283,85

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang

c. Mitra Kecamatan Mijen dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat peran kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, dibutuhkan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak. Kecamatan tidak dapat berdiri sendiri dalam menyelenggarakan pelayanan, melainkan harus bersinergi dengan mitra strategis yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun media. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan pentahelix yang menempatkan semua pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Mitra Kecamatan Mijen dalam Pemberian Pelayanan yaitu :

1. Mitra Internal Pemerintahan
   a) Kelurahan/Desa → sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat;
   b) Lembaga Kemasyarakatan (LPMK, RT/RW, PKK, Karang Taruna, Linmas) → memperkuat partisipasi Masyarakat;
   c) UPTD/Instansi Teknis (pendidikan, kesehatan, pertanian, dll.) → mendukung pelayanan sektoral.
2. Mitra Eksternal
   a) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) & Tokoh Masyarakat → menjaga harmonisasi sosial, kerukunan, dan ketertiban;
   b) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) → menjaga kerukunan dan indeks harmoni;
   c) KWT, Gapoktan, dan UMKM → mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   d) Posyandu & Kader Kesehatan → mendukung pelayanan dasar kesehatan, gizi, stunting, serta pelayanan 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal).
3. Mitra Lintas Sektor
   a) Kepolisian & TNI → keamanan, ketertiban, dan ketahanan wilayah
   b) Dinas/OPD Kabupaten/Kota → dukungan program sektoral dan pendampingan;
   c) Perguruan Tinggi → riset, pendampingan, dan inovasi program;
   d) Dunia Usaha/CSR → mendukung pembiayaan pembangunan, pemberdayaan, dan program social.
4. Mitra Strategis Lainnya
   a) Media Massa → publikasi dan transparansi informasi pelayanan public;
   b) LSM/Komunitas → advokasi isu sosial (gender, anak, kemiskinan, lingkungan);
   c) Relawan & Komunitas Pemuda → penguatan partisipasi sosial dan kegiatan pelayanan berbasis masyarakat.

d. Inovasi Kecamatan Mijen Kota Semarang

Terkait pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB
   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan di Kelurahan di Kecamatan Mijen. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.
2. FORLAK (Forum Kolaborasi Apik) Pecah-Bayar SPPT PBB di Kecamatan Mijen
   Merupakan kolaborasi yang terintegrasi antara Pegawai, Dinas terkait dan Stakeholder Eksternal dalam rangka upaya percepatan pelayanan pecah-bayar PBB di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
3. Mijen Mari Tanem (Mijen Remaja Putri Tanpa Anemia)
   Merupakan program penanggulangan Anemia pada Remaja Putri usia 15-23 Tahun yang dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen. Pada remaja putri tersebut dilakukan pengukuran kadar darah, selanjutnya bagi yang positif anemia akan diberi suplemen dan pendampingan dari tenaga kesehatan.

4. SIPONJEN KITA
   Merupakan salah satu bentuk inovasi Kelurahan Mijen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi. Dengan aplikasi ini masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyampaian informasi dan pengaduan secara online dan cepat.
5. Lapor Camat
   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Mijen dalam memberikan aduan tentang pelayan atau permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Mijen, sehingga lebih cepat untuk di tindaklanjuti.

II.1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mijen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan
   Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Mijen sebagai berikut:
   1. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam mengembangkan wilayah melalui perencanaan Pembangunan Kecamatan;
   2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mijen;
   3. Potensi konflik sosial, gangguan keamanan, gangguan ketenteraman dan ketertiban yang mungkin terjadi di wilayah Kecamatan Mijen;
   4. Kesiapan masyarakat di wilayah Kecamatan Mijen dalam pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik masih rendah.

b. Peluang
   Sedangkan peluang bagi Kecamatan Mijen untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya Adalah :
   1. Peran kecamatan dan kelurahan yang semakin besar dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
   2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Digitalisasi Pelayanan) dan Keterbukaan Informasi;
   3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui keterlibatan aktif bisa menjadi pengawas, pendorong peningkatan layanan dan memotivasi perubahan.

II.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MIJEN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Mijen Kota Semarang telahaan tata

ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang.

II.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah **"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan"**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Mijen terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **"Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan"**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah **"Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan"**.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif
   Data yang tersedia menunjukkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif belum optimal, dimana dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 80,00% pada Tahun 2020; 95,00% pada Tahun 2021; 84,00% pada Tahun 2022; 100,00% pada Tahun 2023; serta 100,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan.
   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
b. Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan
   Dalam kurun waktu tahun 2021-2024, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional mengalami fluktuasi yaitu sebesar 87,00% pada Tahun 2021; 58,00% pada Tahun 2022, 100,00% pada Tahun 2023; serta 100,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi

kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan serta sinergitas lintas sektor dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Mijen Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Mijen Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Mijen;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Mijen;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Mijen Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Mijen;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Mijen;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Mijen;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Mijen;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Mijen;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Mijen;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Mijen;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Mijen;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Mijen;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Mijen.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Mijen Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.17
Rumusan Permasalahan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2025 – 2029

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Mijen	belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Mijen
		belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Mijen
		belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Mijen
2	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Mijen	belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Mijen
		belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Mijen
		belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Mijen
		belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Mijen
		masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Mijen
3	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen
		belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Mijen
		belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen
		belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Mijen

II.2.2 TELAAHAN DOKUMEN LAINNYA

A. TELAAHAN RPJMN 2025 – 2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di

tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif.”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk
mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.**

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang,
dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki

standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 **Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 **Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Mijen mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif”** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.”**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu **“Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat”** (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Mijen mendukung pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan kepada**

masyarakat" (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran **"Indeks Pelayanan Publik"** (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran **"Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang"** (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran **"Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan"** (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "**Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah"** (Strategi ke-7 RPJMD), dimana Kecamatan Mijen secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu **Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.**

Secara lengkap peranan Kecamatan Mijen dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

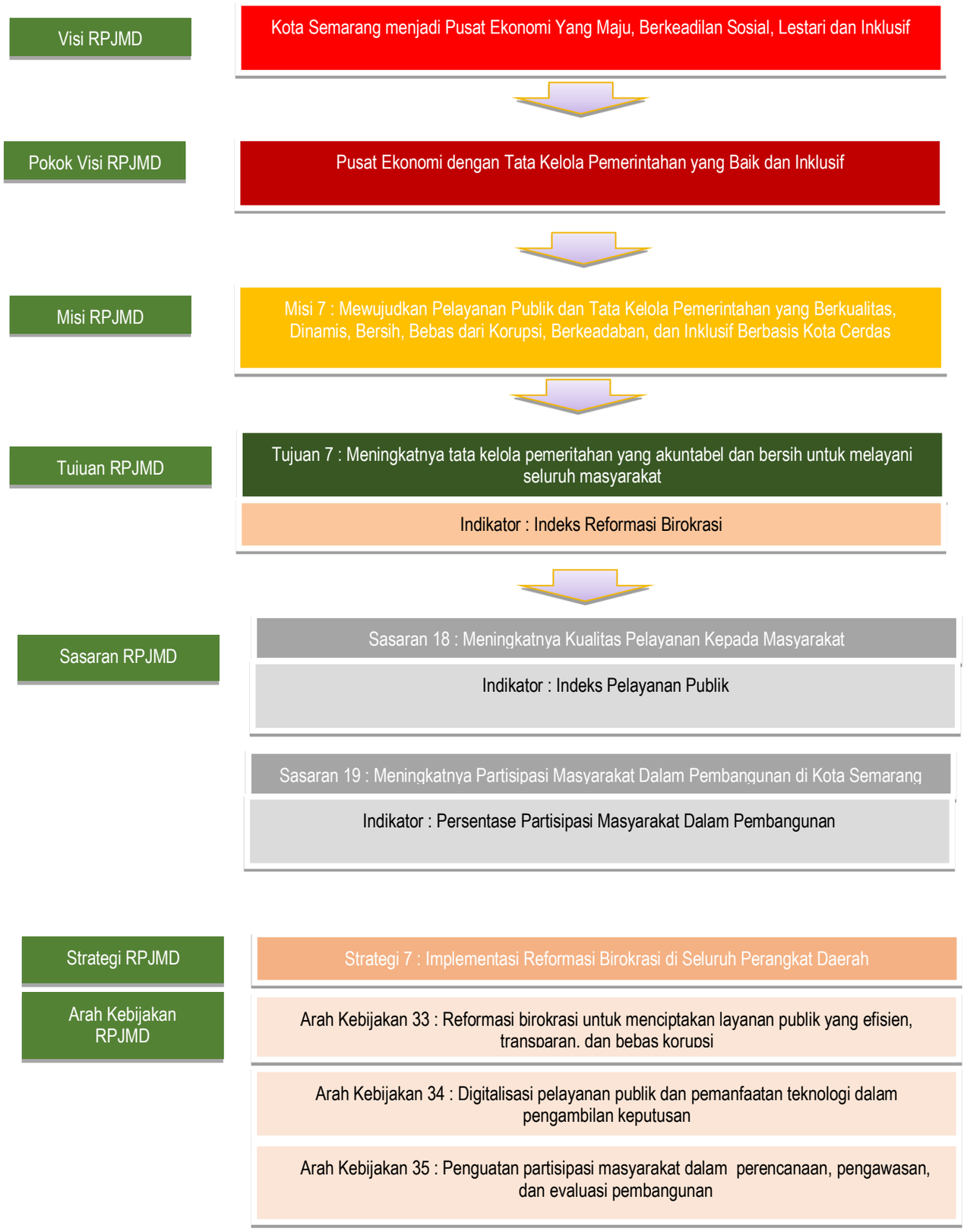

Gambar 2.10
Peranan Kecamatan Mijen dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Semarang, Kecamatan Mijen berkomitmen mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Semarang melalui pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.

Upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, serta layanan masyarakat lainnya dengan mengedepankan prinsip kemudahan akses, kepastian prosedur, dan kepuasan masyarakat. Selain itu, Kecamatan Mijen juga mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital serta memperkuat koordinasi dengan kelurahan untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan warga.

Kecamatan Mijen senantiasa memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan melalui Musrenbang dan forum aspirasi warga, pengawasan melalui lembaga kemasyarakatan serta media pengaduan publik, hingga evaluasi melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam penilaian hasil pembangunan. Dengan keterlibatan aktif ini, pembangunan menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil pembangunan.

Dalam penyelenggaraan Pembangunan, Kecamatan Mijen berkomitmen mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. PUG menjadi strategi penting agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Melalui penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG), Kecamatan Mijen memastikan bahwa alokasi sumber daya pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat secara adil. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan, serta pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga. Komitmen tersebut diperkuat dengan dukungan terhadap program strategis daerah, antara lain pengembangan Kota Layak Anak (KLA), Gerakan Pembangunan Keluarga (GDPK), serta upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting.

Selain itu, melalui Program Kecamatan Berdaya, dimana tujuan dari program ini adalah menjadikan Kecamatan Mijen sebagai pusat kegiatan pemberdayaan dan pembangunan daerah yang berfokus pada kelompok rentan dan masyarakat kreatif, Kecamatan Mijen terus mendorong pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif melalui penyediaan rumah inspirasi untuk layanan disabilitas, perempuan dan anak serta pemuda; ruang kreatif dan pelatihan; pemberdayaan disabilitas; pemberdayaan lansia; dan pelayanan publik yang responsif.

Di bidang kesehatan masyarakat, penguatan Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi fokus untuk memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses secara merata dan berkualitas.

Posyandu 6 SPM adalah konsep posyandu yang mengintegrasikan layanan dasarnya dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup berbagai bidang di luar kesehatan ibu dan anak yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta sosial. Konsep ini merupakan inovasi untuk menjadikan posyandu sebagai pusat pelayanan yang lebih komprehensif dan inklusif di Masyarakat.

Di sisi sosial-kultural, Kecamatan Mijen senantiasa menjaga kerukunan antarumat beragama dan berkontribusi dalam peningkatan Indeks Harmoni melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa toleransi, kebersamaan, dan persaudaraan di tengah masyarakat dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan; dimensi sosial yaitu akses pendidikan, tingkat kriminalitas, serta stabilitas sosial; dimensi budaya yaitu pluralisme dan pelestarian budaya; dan dimensi keagamaan yaitu Kebebasan beragama, toleransi antarumat beragama, dan moderasi beragama.

Dengan sinergi berbagai program tersebut, Kecamatan Mijen tidak hanya berperan aktif mendukung pencapaian indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang adil dan inklusif, serta kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan harmonis.

C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Kecamatan Mijen tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Dalam sistem pengembangan wilayah Kota, Kecamatan dikelompokkan dalam BWK yang meliputi:

a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa berskala internasional;

- pusat pemerintahan Provinsi; dan
- pusat pemerintahan Kota.

b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pusat pendidikan kepolisian; dan
   - pusat olahraga
c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - transportasi laut;
   - transportasi udara; dan
   - kantor pelayanan pemerintahan Provinsi
d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk; , dengan rencana pengembangan fungsi utama berupa industri.
e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - jasa pertemuan dan pameran.
f. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang, dengan rencana pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi.
g. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perkantoran militer; dan
   - perdagangan dan jasa.
h. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pendidikan tinggi; dan
   - paru-paru Kota.
i. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
   - paru-paru Kota.
j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - industri.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Mijen masuk dalam wilayah BWK IX, dengan rencana pengembangan fungsi utama sebagai kantor pelayanan pemerintahan kota.
Sedangkan untuk rencana struktur ruang Kecamatan Mijen meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Sub Pusat Pelayanan Kota, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Mijen adalah Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Wonolopo.
2. Pusat Lingkungan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala pelayanan lingkungan permukiman. Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di Kecamatan Mijen yaitu:

- pusat lingkungan IX.1 berada di Kelurahan Kedungpane dengan daerah pelayanan Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Pesantren;
- pusat lingkungan IX.2 berada di Kelurahan Mijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonolopo, Kelurahan Ngadirgo dan Kelurahan Wonoplumbon;
- pusat lingkungan IX.3 berada di Kelurahan Cangkiran dengan daerah pelayanan Kelurahan Bubakan, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Jatisari; dan
- pusat lingkungan IX.4 berada di Kelurahan Purwosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Polaman dan Kelurahan Karangmalang.

Selain itu, dalam bidang transportasi juga direncanakan akan ada pengembangan dan peningkatan terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Cangkiran. Sedangkan dalam sistem jaringan, akan ada peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Peningkatan saluran yang melalui Jrakah – Mijen – Boja.

Untuk rencana pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi, meliputi (1) penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS); (2) penanganan terhadap daerah irigasi (D.I); dan (3) pengembangan waduk dan embung, dimana Kecamatan Mijen masuk dalam pengembangan waduk dan embung.

Rencana pengembangan waduk dan embung di wilayah Kecamatan Mijen, terdapat pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Barat sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Waduk Jatibarang dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar berada di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen, Kelurahan Kandri dan Jatirejo Kecamatan Gunungpati.

2. Waduk Mundingan dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar berada di Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen dan Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati.

Sedangkan rencana pengembangan waduk dan embung di wilayah Kecamatan Mijen pada sub sistem drainase sungai, meliputi:

1. Sub sistem drainase Sungai Mangkang, Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane.
2. Sub sistem drainase Sungai Plumbon meliputi Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo.

E. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA SEMARANG

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (4) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan masalah strategis "**Belum optimalnya pelayanan public yang "transparan dan akuntabel**", dan isu strategis "**Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab**", seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.18
Tema isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Mijen Kota Semarang

Pilar	Masalah Strategis	Isu Strategis
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

II.2.3 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen adalah isu strategis ke tujuh, yaitu “Penyelenggaraan Good Governance”. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mijen, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mijen, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Isu Strategis Kecamatan Mijen
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Mijen	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Mijen
		belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Mijen						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen
		belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen						Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Mijen

Sumber : Kecamatan Mijen 2025

B A B III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mijen dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Mijen Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal “Reformasi Birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi”; “Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan”; “Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan”.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah “**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**”, dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**.

III.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN MIJEN

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :

“Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Mijen”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Mijen Kota Semarang, yaitu :

1. **“Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Mijen”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).

2. **“Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Mijen”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

III.2. SASARAN RENSTRA KECAMATAN MIJEN

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Mijen Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang, dimana Kecamatan Mijen mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Mijen.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Mijen maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Mijen**
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mijen**.
      Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
   2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mijen**
      Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Mijen**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Mijen**".

   Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Mijen terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Mijen**".

   Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Mijen melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Mijen.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat												
	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Mijen		**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Mijen**	**Angka**	**95,00**	**95,00**	**96,00**	**96,50**	**97,00**	**97,50**	**98,00**	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Mijen	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mijen**	**Angka**	**75,55**	**76,00**	**76,30**	**76,60**	**76,80**	**77,00**	**77,30**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mijen	**Angka**	**93,00**	**93,50**	**93,80**	**94,00**	**94,50**	**95,00**	**95,50**	
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Mijen	**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Mijen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**96,00**	**97,00**	**98,00**	**99,00**	**100,00**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Mijen	**Angka**	**78,00**	**79,00**	**80,00**	**81,00**	**82,00**	**83,00**	**84,00**	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang												
		SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	**Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen**	**Angka**	**76,00**	**78,00**	**80,00**	**82,00**	**84,00**	**86,00**	**88,00**	

Sumber: Kecamatan Mijen 2025

III. 3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MIJEN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Mijen Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

III.3.1 STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Mijen	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Mijen	Memaksimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Mijen	Menguatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Mijen	Menyempurnakan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Mijen
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen	Penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen	Percepatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen	Percepatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen

Sumber: Kecamatan Mijen 2025

III.3.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Mijen Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Mijen

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Mijen;
(b) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Mijen;
(c) peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Mijen.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(d) peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Mijen;
(e) peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
(f) peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Mijen;
(g) peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Mijen;
(h) peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Mijen;
(i) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Mijen.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen;
(b) peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Mijen;
(c) peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen;
(d) peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Mijen.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Mijen	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Mijen	
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Mijen	
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Mijen	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Mijen	
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Mijen	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Mijen	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Mijen	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Mijen	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Mijen	

Sumber: Kecamatan Mijen 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Mijen	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Mijen	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Mijen	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Mijen
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Mijen
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Mijen
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Mijen	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Mijen
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Mijen
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Mijen
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Mijen
			6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Mijen
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mijen
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Mijen
			3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Mijen

Sumber: Kecamatan Mijen 2025

B A B IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN MIJEN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Mijen untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Mijen

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Mijen				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Mijen**		**Camat**
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		S1:Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Mijen			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mijen		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Mijen yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen		Sekretaris Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Mijen	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Mijen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya	Jumlah Gedung Kantor dan	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Staf Umum

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Kepegawaian
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan mijen yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Seksi Pemerintahan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Mijen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayanan Publik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Cangkiran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cangkiran	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Cangkiran
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Cangkiran	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Cangkiran
				Terselenggaranya	Persentase Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Urusan	Lurah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bubakan	Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bubakan	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Bubakan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bubakan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Bubakan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangmalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangmalang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Karangmalang
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Karangmalang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Karangmalang
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Polaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Polaman	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Polaman

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Polaman	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Polaman
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwosari	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Purwosari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Purwosari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Purwosari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tambangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambangan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Tambangan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tambangan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Tambangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonolopo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonolopo	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Wonolopo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Wonolopo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	Sekretaris dan Staf Kelurahan Wonolopo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mijen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Mijen
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mijen	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Mijen
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatibarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatibarang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Jatibarang
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Jatibarang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Jatibarang

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di Kelurahan Jatibarang			
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kedungpane	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kedungpane	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kedungpane
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kedungpane	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Kedungpane
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Ngadirgo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngadirgo	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Ngadirgo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Ngadirgo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Ngadirgo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonoplumbon	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Wonoplumbon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Wonoplumbon	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Wonoplumbon
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatisari	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Jatisari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Jatisari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Jatisari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pesantren	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pesantren	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Pesantren
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kelurahan Pesantren

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Pesantren	Kelurahan Pesantren		
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Mijen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pembangunan Kecamatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Cangkiran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cangkiran	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Cangkiran
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Cangkiran	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Cangkiran
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bubakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bubakan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kewenangan camat di Kelurahan Bubakan			
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bubakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Bubakan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangmalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangmalang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Karangmalang
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangmalang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Karangmalang
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Polaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Polaman	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Polaman

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Polaman	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Polaman
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Purwosari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Purwosari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Purwosari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Purwosari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tambangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tambangan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tambangan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tambangan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Tambangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di Kelurahan Tambangan			
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonolopo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonolopo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Wonolopo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Wonolopo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Wonolopo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mijen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Mijen
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mijen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Mijen
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatibarang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Jatibarang

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kewenangan camat di Kelurahan Jatibarang			
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Jatibarang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Jatibarang
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kedungpane	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kedungpane	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kedungpane
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kedungpane	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Kedungpane
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Ngadirgo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngadirgo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Ngadirgo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Ngadirgo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Ngadirgo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonoplumbon	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Wonoplumbon
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Wonoplumbon	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Wonoplumbon
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatisari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Jatisari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Jatisari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Jatisari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di Kelurahan Jatisari			
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pesantren	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pesantren	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pesantren
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pesantren	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Pesantren
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mijen	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Staf Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan	Kecamatan	
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Mijen	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang		S3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		Camat
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Pembangunan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Mijen	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Cangkiran	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Cangkiran
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Cangkiran	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Cangkiran
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Bubakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bubakan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Bubakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Bubakan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Karangmalang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Karangmalang

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegitan pemberdayaan di Kelurahan Karangmalang			
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Karangmalang	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Karangmalang
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Polaman	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Polaman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Polaman
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Polaman	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Polaman
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Purwosari	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Purwosari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Purwosari			
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Purwosari	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Purwosari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Tambangan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tambangan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Tambangan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Tambangan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Wonolopo	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Wonolopo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Wonolopo	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Wonolopo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Mijen	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Mijen
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Mijen	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Mijen
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Jatibarang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Jatibarang
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Jatibarang	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Jatibarang

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Kedungpane	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kedungpane
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Kedungpane	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Kedungpane
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Ngadirgo	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Ngadirgo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Ngadirgo	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Ngadirgo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Wonoplumbon	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Wonoplumbon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Wonoplumbon	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Wonoplumbon
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Jatisari	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Jatisari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Jatisari	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Jatisari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Pesantren	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Pesantren
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Pesantren	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Staf Kelurahan Pesantren

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Mijen	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cangkiran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cangkiran	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Cangkiran
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Cangkiran	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Cangkiran
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bubakan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bubakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bubakan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bubakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Staf Kelurahan Bubakan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangmalang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangmalang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Karangmalang
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Karangmalang	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Karangmalang
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Polaman	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Polaman	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Polaman
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Polaman	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Polaman
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwosari	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Purwosari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Purwosari			
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Purwosari	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Purwosari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambangan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tambangan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Tambangan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Tambangan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonolopo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonolopo	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Wonolopo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Wonolopo	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Wonolopo			Umum dan Staf Kelurahan Wonolopo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mijen	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Mijen
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mijen	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Mijen
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatibarang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatibarang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Jatibarang
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Jatibarang	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Jatibarang
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kedungpane	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kedungpane

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemerintah di Kelurahan Kedungpane			
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Kedungpane	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Kedungpane
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngadirgo	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Ngadirgo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ngadirgo	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Ngadirgo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonoplumbon	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Wonoplumbon
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Wonoplumbon	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Staf Kelurahan Wonoplumbon
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatisari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatisari	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Jatisari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Jatisari	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Jatisari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pesantren	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pesantren	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pesantren
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pesantren	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Staf Kelurahan Pesantren
				Meningkatnya fungsi koordinasi	Persentase peningkatan kapasitas lembaga		Kepala Seksi Perekonomian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	kemasyarakatan		dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Sumber: Kecamatan Mijen 2025

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan**	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen**		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	**Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan**	**Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	**Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)**	**Terwujudnya ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat**		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	**Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil**			
7.	**Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi**			
8.	**Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK**			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber: Kecamatan Mijen 2025

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Mijen dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Mijen Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program.

Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATAN MIJEN				**55.084.755.279**		**59.529.879.847**		**61.464.604.965**		**61.819.986.477**		**62.658.257.868**	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**25.905.907.150**		**28.917.364.269**		**30.183.926.305**		**30.372.998.524**		**30.890.580.620**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Mijen yang berkualitas**	**100,00 %**	**100,00 %**	**25.905.907.150**	**100,00 %**	**28.917.364.269**	**100,00 %**	**30.183.926.305**	**100,00 %**	**30.372.998.524**	**100,00 %**	**30.890.580.620**	
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**62.256.210**		**65.369.020**		**67.983.781**		**73.323.700**		**74.570.203**	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00 %**	**100,00 %**	**62.256.210**	**100,00 %**	**65.369.020**	**100,00 %**	**67.983.781**	**100,00 %**	**73.323.700**	**100,00 %**	**74.570.203**	
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.380		5.250.399		5.460.415		10.487.717		10.666.008	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	5.000.380	4 Dokumen	5.250.399	4 Dokumen	5.460.415	6 Dokumen	10.487.717	4 Dokumen	10.666.008	
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.984.750		4.183.988		4.351.347		4.373.104		4.447.446	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.984.750	1 Dokumen	4.183.988	1 Dokumen	4.351.347	1 Dokumen	4.373.104	1 Dokumen	4.447.446	
X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				894.000		938.700		976.248		981.129		997.808	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	1 Dokumen	938.700	1 Dokumen	976.248	1 Dokumen	981.129	1 Dokumen	997.808	
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				759.000		796.950		828.828		832.972		847.133	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	759.000	1 Dokumen	796.950	1 Dokumen	828.828	1 Dokumen	832.972	1 Dokumen	847.133	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Dokumen DPA SKPD												
X.XX.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				894.000		938.700		976.248		981.129		997.808	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	1 Dokumen	938.700	1 Dokumen	976.248	1 Dokumen	981.129	1 Dokumen	997.808	
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				724.080		760.284		790.695		794.649		808.158	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	724.080	2 Laporan	760.284	2 Laporan	790.695	2 Laporan	794.649	2 Laporan	808.158	
X.XX.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		52.500.000		54.600.000		54.873.000		55.805.841	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	54.600.000	1 Dokumen	54.873.000	1 Dokumen	55.805.841	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**22.077.626.701**		**23.307.139.750**		**24.462.422.043**		**25.638.425.156**		**26.885.618.083**	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00%**	**100,00%**	**22.077.626.701**	**100,00%**	**23.307.139.750**	**100,00%**	**24.462.422.043**	**100,00%**	**25.638.425.156**	**100,00%**	**26.885.618.083**	
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.238.608.901		22.300.530.826		23.415.548.761		24.586.317.508		25.815.624.606	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	107 Orang	120 Orang	21.238.608.901	120 Orang	22.300.530.826	120 Orang	23.415.548.761	120 Orang	24.586.317.508	120 Orang	25.815.624.606	
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				837.601.560		1.005.121.872		1.045.326.747		1.050.553.381		1.068.412.788	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	837.601.560	12 Dokumen	1.005.121.872	12 Dokumen	1.045.326.747	12 Dokumen	1.050.553.381	12 Dokumen	1.068.412.788	
X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				354.060		371.763		386.634		388.567		395.172	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	354.060	1 Laporan	371.763	1 Laporan	386.634	1 Laporan	388.567	1 Laporan	395.172	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)												
X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				708.120		743.526		773.267		777.133		790.345	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Laporan	12 Laporan	708.120	12 Laporan	743.526	12 Laporan	773.267	12 Laporan	777.133	12 Laporan	790.345	
X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				354.060		371.763		386.634		388.567		395.172	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	354.060	1 Dokumen	371.763	1 Dokumen	386.634	1 Dokumen	388.567	1 Dokumen	395.172	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	**96,00%**	**96,33%**	**3.766.024.239**	**97,00%**	**5.544.855.499**	**97,33%**	**5.653.520.481**	**97,67%**	**4.661.249.668**	**98,00%**	**3.930.392.334**	
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**46.800.000**		**49.140.000**		**51.105.600**		**51.361.128**		**52.234.267**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Mijen	**Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Mijen**	**88 Aangka**	**89 Angka**	**46.800.000**	**91 Angka**	**49.140.000**	**92 Angka**	**51.105.600**	**93 Angka**	**51.361.128**	**94 Angka**	**52.234.267**	
X.XX.01.1.05. 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		10.500.000		10.920.000		10.974.600		11.161.168	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.500.000	4 Dokumen	10.920.000	4 Dokumen	10.974.600	4 Dokumen	11.161.168	
X.XX.01.1.05. 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				36.800.000		38.640.000		40.185.600		40.386.528		41.073.099	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	352 Orang	370 Orang	36.800.000	370 Orang	38.640.000	370 Orang	40.185.600	370 Orang	40.386.528	370 Orang	41.073.099	
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				**979.571.908**		**1.505.058.279**		**1.563.260.609**		**1.118.591.939**		**973.432.084**	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen**	**100,00%**	**100,00%**	**979.571.908**	**100,00%**	**1.505.058.279**	**100,00%**	**1.563.260.609**	**100,00%**	**1.118.591.939**	**100,00%**	**973.432.084**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.489.670		72.587.604		75.491.108		75.868.566		77.158.331	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12 Paket	60.489.670	12 Paket	72.587.604	12 Paket	75.491.108	12 Paket	75.868.566	12 Paket	77.158.331	
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.093.671		26.512.405		27.572.901		27.710.765		28.181.848	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12 Paket	22.093.671	12 Paket	26.512.405	12 Paket	27.572.901	12 Paket	27.710.765	12 Paket	28.181.848	
X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.188.800		33.798.240		35.150.170		35.325.920		35.926.461	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	32.188.800	12 Laporan	33.798.240	12 Laporan	35.150.170	12 Laporan	35.325.920	12 Laporan	35.926.461	
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				155.794.800		171.374.280		178.229.251		179.120.397		182.165.444	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	155.794.800	12 Laporan	171.374.280	12 Laporan	178.229.251	12 Laporan	179.120.397	12 Laporan	182.165.444	
X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				709.004.967		1.200.785.750		1.246.817.179		800.566.291		650.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1 Dokumen	4 Dokumen	709.004.967	4 Dokumen	1.200.785.750	4 Dokumen	1.246.817.179	4 Dokumen	800.566.291	4 Dokumen	650.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)												
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**633.189.111**		**1.183.294.667**		**1.358.444.000**		**1.015.022.555**		**595.993.799**	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen**	**100,00%**	**100,00%**	**633.189.111**	**100,00%**	**1.183.294.667**	**100,00%**	**1.358.444.000**	**100,00%**	**1.015.022.555**	**100,00%**	**595.993.799**	
X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				633.189.110.000		1.183.294.666		1.358.444.000		1.015.022.555		595.993.799	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	15 Unit	633.189.110.000	17 Unit	1.183.294.666	20 Unit	1.358.444.000	20 Unit	1.015.022.555	20 Unit	595.993.799	
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.362.896.424**		**1.428.375.997**		**1.485.511.037**		**1.499.269.961**		**1.503.015.631**	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen yang selesai ditindaklanjuti**	**100,00%**	**100,00%**	**1.362.896.424**	**100,00%**	**1.428.375.997**	**100,00%**	**1.485.511.037**	**100,00%**	**1.499.269.961**	**100,00%**	**1.503.015.631**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				203.305.095		210.805.102		219.237.306		220.333.492		224.079.162	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	203.305.095	12 Laporan	210.805.102	12 Laporan	219.237.306	12 Laporan	220.333.492	12 Laporan	224.079.162	
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.159.591.329		1.217.570.895		1.266.273.731		1.278.936.469		1.278.936.469	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1.159.591.329	12 Laporan	1.217.570.895	12 Laporan	1.266.273.731	12 Laporan	1.278.936.469	12 Laporan	1.278.936.469	
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**743.566.797**		**1.378.986.556**		**1.195.199.235**		**977.004.085**		**805.716.553**	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen sesuai ketentuan**	**100,00%**	**100,00%**	**743.566.797**	**100,00%**	**1.378.986.556**	**100,00%**	**1.195.199.235**	**100,00%**	**977.004.085**	**100,00%**	**805.716.553**	
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan				207.936.000		228.729.600		237.878.784		239.068.178		243.132.337	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	207.936.000	35 Unit	228.729.600	35 Unit	237.878.784	35 Unit	239.068.178	35 Unit	243.132.337	
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.630.797		102.756.956		106.867.235		132.935.907		135.195.817	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	85.630.797	35 Unit	102.756.956	37 Unit	106.867.235	40 Unit	132.935.907	42 Unit	135.195.817	
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				450.000.000		1.047.500.000		850.453.216		605.000.000		427.388.399	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	11 Unit	450.000.000	11 Unit	1.047.500.000	11 Unit	850.453.216	11 Unit	605.000.000	11 Unit	427.388.399	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**2.358.703.685**		**2.608.754.719**		**2.788.823.745**		**2.854.836.875**		**2.938.832.837**	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan mijen yang tepat waktu**	**100,00%**	**100,00%**	**2.358.703.685**	**100,00%**	**2.608.754.719**	**100,00%**	**2.788.823.745**	**100,00%**	**2.854.836.875**	**100,00%**	**2.938.832.837**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**354.200.000**		**412.379.969**		**432.998.967**		**437.328.957**		**445.651.288**	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait**	**100,00%**	**100,00%**	**4.200.000**	**100,00%**	**4.620.000**	**100,00%**	**4.851.000**	**100,00%**	**4.899.510**	**100,00%**	**4.982.802**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.200.000		4.620.000		4.851.000		4.899.510		4.982.802	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	1 Laporan	4.200.000	1 Laporan	4.620.000	1 Laporan	4.851.000	1 Laporan	4.899.510	1 Laporan	4.982.802	
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100,00%**	**100,00%**	**350.000.000**	**100,00%**	**407.759.969**	**100,00%**	**428.147.967**	**100,00%**	**432.429.447**	**100,00%**	**440.668.486**	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				350.000.000		407.759.969		428.147.967		432.429.447		440.668.486	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	407.759.969	3 Dokumen	428.147.967	3 Dokumen	432.429.447	3 Dokumen	440.668.486	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				**1.436.503.685**		**1.571.574.750**		**1.694.240.778**		**1.730.828.078**		**1.778.819.851**	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Mijen	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100,00%**	**100,00%**	**285.976.811**	**100,00%**	**305.995.187,77**	**100,00%**	**327.414.850,91**	**100,00%**	**350.333.890,48**	**100,00%**	**374.857.262,81**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				285.976.811		305.995.187,77		327.414.850,91		350.333.890,48		374.857.262,81	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mijen	12 Laporan	12 Laporan	285.976.811	12 Laporan	305.995.187,77	12 Laporan	327.414.850,91	12 Laporan	350.333.890,48	12 Laporan	374.857.262,81	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Cangkiran	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cangkiran**	**100,00%**	**100,00%**	**84.171.184**	**100,00%**	**92.588.303**	**100,00%**	**99.995.367**	**100,00%**	**100.995.320**	**100,00%**	**102.712.241**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				84.171.184		92.588.303		99.995.367		100.995.320		102.712.241	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	84.171.184	12 Laporan	92.588.303	12 Laporan	99.995.367	12 Laporan	100.995.320	12 Laporan	102.712.241	Kelurahan Cangkiran
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bubakan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bubakan**	**100,00%**	**100,00%**	**79.935.304**	**100,00%**	**87.928.834**	**100,00%**	**94.963.141**	**100,00%**	**95.912.773**	**100,00%**	**97.543.290**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				79.935.304		87.928.834		94.963.141		95.912.773		97.543.290	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	79.935.304	12 Laporan	87.928.834	12 Laporan	94.963.141	12 Laporan	95.912.773	12 Laporan	97.543.290	Kelurahan Bubakan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangmalang	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangmalang**	**100,00%**	**100,00%**	**79.553.464**	**100,00%**	**87.508.810**	**100,00%**	**94.509.515**	**100,00%**	**95.454.610**	**100,00%**	**97.077.340**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				79.553.464		87.508.810		94.509.515		95.454.610		97.077.340	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	79.553.464	12 Laporan	87.508.810	12 Laporan	94.509.515	12 Laporan	95.454.610	12 Laporan	97.077.340	Kelurahan Karangmalang
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Polaman	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Polaman**	**100,00%**	**100,00%**	**81.627.534**	**100,00%**	**89.790.287**	**100,00%**	**96.973.510**	**100,00%**	**97.943.245**	**100,00%**	**99.608.281**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.627.534		89.790.287		96.973.510		97.943.245		99.608.281	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	81.627.534	12 Laporan	89.790.287	12 Laporan	96.973.510	12 Laporan	97.943.245	12 Laporan	99.608.281	Kelurahan Polaman
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Purwosari	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwosari**	**100,00%**	**100,00%**	**81.147.045**	**100,00%**	**89.261.750**	**100,00%**	**96.402.689**	**100,00%**	**97.366.716**	**100,00%**	**99.021.951**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.147.045		89.261.750		96.402.689		97.366.716		99.021.951	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	81.147.045	12 Laporan	89.261.750	12 Laporan	96.402.689	12 Laporan	97.366.716	12 Laporan	99.021.951	Kelurahan Purwosari
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tambangan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan**	**100,00%**	**100,00%**	**81.545.586**	**100,00%**	**89.700.145**	**100,00%**	**96.876.156**	**100,00%**	**97.844.918**	**100,00%**	**99.508.281**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambangan												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.545.586		89.700.145		96.876.156		97.844.918		99.508.281	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	81.545.586	12 Laporan	89.700.145	12 Laporan	96.876.156	12 Laporan	97.844.918	12 Laporan	99.508.281	Kelurahan Tambangan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonolopo	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonolopo**	**100,00%**	**100,00%**	**87.499.905**	**100,00%**	**96.249.896**	**100,00%**	**103.949.887**	**100,00%**	**104.989.386**	**100,00%**	**106.774.206**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				87.499.905		96.249.896		103.949.887		104.989.386		106.774.206	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	87.499.905	12 Laporan	96.249.896	12 Laporan	103.949.887	12 Laporan	104.989.386	12 Laporan	106.774.206	Kelurahan Wonolopo

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mijen	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mijen**	**100,00%**	**100,00%**	**80.057.231**	**100,00%**	**88.062.954**	**100,00%**	**95.107.990**	**100,00%**	**96.059.070**	**100,00%**	**97.692.075**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.057.231		88.062.954		95.107.990		96.059.070		97.692.075	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	80.057.231	12 Laporan	88.062.954	12 Laporan	95.107.990	12 Laporan	96.059.070	12 Laporan	97.692.075	Kelurahan Mijen
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatibarang	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatibarang**	**100,00%**	**100,00%**	**83.760.960**	**100,00%**	**92.137.056**	**100,00%**	**99.508.020**	**100,00%**	**100.503.101**	**100,00%**	**102.211.653**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				83.760.960		92.137.056		99.508.020		100.503.101		102.211.653	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	83.760.960	12 Laporan	92.137.056	12 Laporan	99.508.020	12 Laporan	100.503.101	12 Laporan	102.211.653	Kelurahan Jatibarang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kedungpane	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kedungpane**	**100,00%**	**100,00%**	**83.499.840**	**100,00%**	**91.849.824**	**100,00%**	**99.197.810**	**100,00%**	**100.189.788**	**100,00%**	**101.893.014**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				83.499.840		91.849.824		99.197.810		100.189.788		101.893.014	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.499.840	12 Laporan	91.849.824	12 Laporan	99.197.810	12 Laporan	100.189.788	12 Laporan	101.893.014	Kelurahan Kedungpane
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Ngadirgo	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngadirgo**	**100,00%**	**100,00%**	**81.968.467**	**100,00%**	**90.165.314**	**100,00%**	**97.378.539**	**100,00%**	**98.352.324**	**100,00%**	**100.024.314**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.968.467		90.165.314		97.378.539		98.352.324		100.024.314	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	81.968.467	12 Laporan	90.165.314	12 Laporan	97.378.539	12 Laporan	98.352.324	12 Laporan	100.024.314	Kelurahan Ngadirgo
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonoplumbon	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonoplumbon**	**100,00%**	**100,00%**	**72.990.540**	**100,00%**	**80.289.594**	**100,00%**	**86.712.762**	**100,00%**	**87.579.889**	**100,00%**	**89.068.747**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				72.990.540		80.289.594		86.712.762		87.579.889		89.068.747	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.990.540	12 Laporan	80.289.594	12 Laporan	86.712.762	12 Laporan	87.579.889	12 Laporan	89.068.747	Kelurahan Wonoplumbon
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatisari	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan**	**100,00%**	**100,00%**	**90.455.980**	**100,00%**	**99.501.578**	**100,00%**	**107.461.704**	**100,00%**	**108.536.321**	**100,00%**	**110.381.439**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatisari												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				90.455.980		99.501.578		107.461.704		108.536.321		110.381.439	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	90.455.980	12 Laporan	99.501.578	12 Laporan	107.461.704	12 Laporan	108.536.321	12 Laporan	110.381.439	Kelurahan Jatisari
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pesantren	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pesantren**	**100,00%**	**100,00%**	**82.313.834**	**100,00%**	**90.545.217**	**100,00%**	**97.788.835**	**100,00%**	**98.766.723**	**100,00%**	**100.445.757**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				82.313.834		90.545.217		97.788.835		98.766.723		100.445.757	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	82.313.834	12 Laporan	90.545.217	12 Laporan	97.788.835	12 Laporan	98.766.723	12 Laporan	100.445.757	Kelurahan Pesantren

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**568.000.000**		**624.800.000**		**661.584.000**		**686.679.840**		**714.361.697**	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Mijen	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100,00%**	**100,00%**	**568.000.000**	**100,00%**	**624.800.000**	**100,00%**	**661.584.000**	**100,00%**	**686.679.840**	**100,00%**	**714.361.697**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				400.000.000		440.000.000		462.000.000		485.100.000		509.355.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	440.000.000	12 Laporan	462.000.000	12 Laporan	485.100.000	12 Laporan	509.355.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Cangkiran	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cangkiran**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Cangkiran
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bubakan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bubakan**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Bubakan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangmalang	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangmalang**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Karangmalang
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Polaman	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Polaman**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Polaman
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Purwosari	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Purwosari**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Purwosari
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tambangan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tambangan**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Tambangan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonolopo	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonolopo**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Wonolopo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mijen	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mijen**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Mijen
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatibarang	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatibarang**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Jatibarang
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kedungpane	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kedungpane**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Kedungpane
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Ngadirgo	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngadirgo**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Ngadirgo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonoplumbon	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonoplumbon**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Wonoplumbon
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatisari	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatisari**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Jatisari
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pesantren	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pesantren**	**100,00%**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**13.200.000**	**100,00%**	**14.256.000**	**100,00%**	**14.398.560**	**100,00%**	**14.643.336**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.000.000		13.200.000		14.256.000		14.398.560		14.643.336	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	14.256.000	12 Laporan	14.398.560	12 Laporan	14.643.336	Kelurahan Pesantren
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**87.374.087**		**96.617.884**		**100.641.214**		**101.380.243**		**103.123.458**	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mijen**	**100,00%**	**100,00%**	**87.374.087**	**100,00%**	**96.617.884**	**100,00%**	**100.641.214**	**100,00%**	**101.380.243**	**100,00%**	**103.123.458**	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**87.374.087**		**96.617.885**		**100.641.214**		**101.380.243**		**103.123.457**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**87.374.087**	**12 Kegiatan**	**96.617.885**	**12 Kegiatan**	**100.641.214**	**12 Kegiatan**	**101.380.243**	**12 Kegiatan**	**103.123.457**	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				87.374.087		96.617.885		100.641.214		101.380.243		103.123.457	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	12 Laporan	87.374.087	12 Laporan	96.617.885	12 Laporan	100.641.214	12 Laporan	101.380.243	12 Laporan	103.123.457	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**92.395.587**		**102.170.636**		**106.425.192**		**107.206.693**		**109.050.094**	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Mijen**	**80,00%**	**82,00%**	**92.395.587**	**82,00%**	**102.170.636**	**82,00%**	**106.425.192**	**82,00%**	**107.206.693**	**82,00%**	**109.050.094**	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala				**92.395.587**		**102.170.636**		**106.425.192**		**107.206.693**		**109.050.094**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Daerah													
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**92.395.587**	**2 Kegiatan**	**102.170.636**	**2 Kegiatan**	**106.425.192**	**2 Kegiatan**	**107.206.693**	**2 Kegiatan**	**109.050.094**	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				92.395.587		102.170.636		106.425.192		107.206.693		109.050.094	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	92.395.587	100 Orang	102.170.636	100 Orang	106.425.192	100 Orang	107.206.693	100 Orang	109.050.094	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**26.640.374.770**		**27.804.972.338**		**28.284.788.509**		**28.383.564.142**		**28.616.670.860**	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen**	**100,00%**	**100,00%**	**26.640.374.770**	**100,00%**	**27.804.972.338**	**100,00%**	**28.284.788.509**	**100,00%**	**28.383.564.142**	**100,00%**	**28.616.670.860**	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**1.387.800.000**		**1.438.190.000**		**1.471.740.700**		**1.482.042.885**		**1.507.237.614**	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan	**Jumlah laporan hasil musrenbang**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**35.000.000**	**1 Laporan**	**36.750.000**	**1 Laporan**	**37.852.500**	**1 Laporan**	**38.117.468**	**1 Laporan**	**38.765.464**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
pembangunan													
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				35.000.000		36.750.000		37.852.500		38.117.468		38.765.464	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	36.750.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	37.852.500	6 Lembaga Kemasyarakatan	38.117.468	6 Lembaga Kemasyarakatan	38.765.464	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Mijen	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Mijen**	**11 Kegiatan**	**15 Kegiatan**	**475.000.000**	**15 Kegiatan**	**479.750.000**	**15 Kegiatan**	**484.547.500**	**15 Kegiatan**	**487.939.333**	**15 Kegiatan**	**496.234.301**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				475.000.000		479.750.000		484.547.500		487.939.333		496.234.301	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	475.000.000	3 Pokmas/ Ormas	479.750.000	3 Pokmas/ Ormas	484.547.500	3 Pokmas/ Ormas	487.939.333	3 Pokmas/ Ormas	496.234.301	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Cangkiran	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Cangkiran**	**9 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**63.600.000**	**8 Kegiatan**	**66.780.000**	**8 Kegiatan**	**68.783.400**	**8 Kegiatan**	**69.264.884**	**8 Kegiatan**	**70.442.387**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				63.600.000		66.780.000		68.783.400		69.264.884		70.442.387	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	63.600.000	6 Pokmas/ Ormas	66.780.000	6 Pokmas/ Ormas	68.783.400	6 Pokmas/ Ormas	69.264.884	6 Pokmas/ Ormas	70.442.387	Kelurahan Cangkiran
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bubakan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bubakan**	**7 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**51.000.000**	**8 Kegiatan**	**53.550.000**	**8 Kegiatan**	**55.156.500**	**8 Kegiatan**	**55.542.596**	**8 Kegiatan**	**56.486.820**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				51.000.000		53.550.000		55.156.500		55.542.596		56.486.820	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	51.000.000	6 Pokmas/ Ormas	53.550.000	6 Pokmas/ Ormas	55.156.500	6 Pokmas/ Ormas	55.542.596	6 Pokmas/ Ormas	56.486.820	Kelurahan Bubakan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Karangmalang	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Karangmalang**	**7 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**67.800.000**	**8 Kegiatan**	**71.190.000**	**8 Kegiatan**	**73.325.700**	**8 Kegiatan**	**73.838.980**	**8 Kegiatan**	**75.094.243**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				67.800.000		71.190.000		73.325.700		73.838.980		75.094.243	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	67.800.000	6 Pokmas/ Ormas	71.190.000	6 Pokmas/ Ormas	73.325.700	6 Pokmas/ Ormas	73.838.980	6 Pokmas/ Ormas	75.094.243	Kelurahan Karangmalang
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Polaman	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Polaman**	**8 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**42.600.000**	**8 Kegiatan**	**44.730.000**	**8 Kegiatan**	**46.071.900**	**8 Kegiatan**	**46.394.403**	**8 Kegiatan**	**47.183.108**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				42.600.000		44.730.000		46.071.900		46.394.403		47.183.108	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	42.600.000	6 Pokmas/ Ormas	44.730.000	6 Pokmas/ Ormas	46.071.900	6 Pokmas/ Ormas	46.394.403	6 Pokmas/ Ormas	47.183.108	Kelurahan Polaman
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Purwosari	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Purwosari**	**8 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**51.000.000**	**8 Kegiatan**	**53.550.000**	**8 Kegiatan**	**55.156.500**	**8 Kegiatan**	**55.542.596**	**8 Kegiatan**	**56.486.820**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				51.000.000		53.550.000		55.156.500		55.542.596		56.486.820	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	51.000.000	6 Pokmas/ Ormas	53.550.000	6 Pokmas/ Ormas	55.156.500	6 Pokmas/ Ormas	55.542.596	6 Pokmas/ Ormas	56.486.820	Kelurahan Purwosari
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Tambangan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tambangan**	**10 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**46.800.000**	**8 Kegiatan**	**49.140.000**	**8 Kegiatan**	**50.614.200**	**8 Kegiatan**	**50.968.499**	**8 Kegiatan**	**51.834.964**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				46.800.000		49.140.000		50.614.200		50.968.499		51.834.964	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	46.800.000	6 Pokmas/ Ormas	49.140.000	6 Pokmas/ Ormas	50.614.200	6 Pokmas/ Ormas	50.968.499	6 Pokmas/ Ormas	51.834.964	Kelurahan Tambangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Wonolopo	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wonolopo**	**8 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**93.000.000**	**8 Kegiatan**	**97.650.000**	**8 Kegiatan**	**100.579.500**	**8 Kegiatan**	**101.283.557**	**8 Kegiatan**	**103.005.377**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				93.000.000		97.650.000		100.579.500		101.283.557		103.005.377	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	93.000.000	6 Pokmas/ Ormas	97.650.000	6 Pokmas/ Ormas	100.579.500	6 Pokmas/ Ormas	101.283.557	6 Pokmas/ Ormas	103.005.377	Kelurahan Wonolopo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Mijen	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mijen**	**10 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**72.000.000**	**8 Kegiatan**	**75.600.000**	**8 Kegiatan**	**77.868.000**	**8 Kegiatan**	**78.413.076**	**8 Kegiatan**	**79.746.098**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				72.000.000		75.600.000		77.868.000		78.413.076		79.746.098	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	72.000.000	6 Pokmas/ Ormas	75.600.000	6 Pokmas/ Ormas	77.868.000	6 Pokmas/ Ormas	78.413.076	6 Pokmas/ Ormas	79.746.098	Kelurahan Mijen
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jatibarang	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatibarang**	**9 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**55.200.000**	**8 Kegiatan**	**57.960.000**	**8 Kegiatan**	**59.698.800**	**8 Kegiatan**	**60.116.692**	**8 Kegiatan**	**61.138.675**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				55.200.000		57.960.000		59.698.800		60.116.692		61.138.675	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	55.200.000	6 Pokmas/ Ormas	57.960.000	6 Pokmas/ Ormas	59.698.800	6 Pokmas/ Ormas	60.116.692	6 Pokmas/ Ormas	61.138.675	Kelurahan Jatibarang
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kedungpane	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kedungpane**	**11 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**55.200.000**	**8 Kegiatan**	**57.960.000**	**8 Kegiatan**	**59.698.800**	**8 Kegiatan**	**60.116.692**	**8 Kegiatan**	**61.138.675**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				55.200.000		57.960.000		59.698.800		60.116.692		61.138.675	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	55.200.000	6 Pokmas/ Ormas	57.960.000	6 Pokmas/ Ormas	59.698.800	6 Pokmas/ Ormas	60.116.692	6 Pokmas/ Ormas	61.138.675	Kelurahan Kedungpane
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngadirgo	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngadirgo**	**8 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**88.800.000**	**8 Kegiatan**	**93.240.000**	**8 Kegiatan**	**96.037.200**	**8 Kegiatan**	**96.709.460**	**8 Kegiatan**	**98.353.521**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				88.800.000		93.240.000		96.037.200		96.709.460		98.353.521	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	88.800.000	6 Pokmas/ Ormas	93.240.000	6 Pokmas/ Ormas	96.037.200	6 Pokmas/ Ormas	96.709.460	6 Pokmas/ Ormas	98.353.521	Kelurahan Ngadirgo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wonoplumbon	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wonoplumbon**	**8 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**46.800.000**	**8 Kegiatan**	**49.140.000**	**8 Kegiatan**	**50.614.200**	**8 Kegiatan**	**50.968.499**	**8 Kegiatan**	**51.834.964**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				46.800.000		49.140.000		50.614.200		50.968.499		51.834.964	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	46.800.000	6 Pokmas/ Ormas	49.140.000	6 Pokmas/ Ormas	50.614.200	6 Pokmas/ Ormas	50.968.499	6 Pokmas/ Ormas	51.834.964	Kelurahan Wonoplumbon
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jatisari	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatisari**	**7 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**93.000.000**	**8 Kegiatan**	**97.650.000**	**8 Kegiatan**	**100.579.500**	**8 Kegiatan**	**101.283.557**	**8 Kegiatan**	**103.005.377**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				93.000.000		97.650.000		100.579.500		101.283.557		103.005.377	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	93.000.000	6 Pokmas/ Ormas	97.650.000	6 Pokmas/ Ormas	100.579.500	6 Pokmas/ Ormas	101.283.557	6 Pokmas/ Ormas	103.005.377	Kelurahan Jatisari
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Pesantren	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pesantren**	**10 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**51.000.000**	**8 Kegiatan**	**53.550.000**	**8 Kegiatan**	**55.156.500**	**8 Kegiatan**	**55.542.596**	**8 Kegiatan**	**56.486.820**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				51.000.000		53.550.000		55.156.500		55.542.596		56.486.820	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	51.000.000	6 Pokmas/ Ormas	53.550.000	6 Pokmas/ Ormas	55.156.500	6 Pokmas/ Ormas	55.542.596	6 Pokmas/ Ormas	56.486.820	Kelurahan Pesantren

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**25.252.574.770**		**26.366.782.338**		**26.813.047.809**		**26.901.521.257**		**27.109.433.246**	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Mijen	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Mijen**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**25.252.574.770**	**1 Laporan**	**26.366.782.338**	**1 Laporan**	**26.813.047.809**	**1 Laporan**	**26.901.521.257**	**1 Laporan**	**27.109.433.246**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				161.000.000		221.259.229		301.272.761		310.155.620		329.651.816	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	3 Lembaga	161.000.000	3 Lembaga	221.259.229	3 Lembaga	301.272.761	3 Lembaga	310.155.620	3 Lembaga	329.651.816	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cangkiran	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cangkiran**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2.016.600.000**	**1 Laporan**	**2.101.297.200**	**1 Laporan**	**2.130.715.361**	**1 Laporan**	**2.137.107.507**	**1 Laporan**	**2.154.204.367**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.016.600.000		2.101.297.200		2.130.715.361		2.137.107.507		2.154.204.367	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.016.600.000	6 Lembaga	2.101.297.200	6 Lembaga	2.130.715.361	6 Lembaga	2.137.107.507	6 Lembaga	2.154.204.367	Kelurahan Cangkiran
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bubakan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.278.000.000**	**1 Laporan**	**1.331.676.000**	**1 Laporan**	**1.350.319.464**	**1 Laporan**	**1.354.370.422**	**1 Laporan**	**1.363.851.015**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kelurahan Bubakan													
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.278.000.000		1.331.676.000		1.350.319.464		1.354.370.422		1.363.851.015	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.278.000.000	6 Lembaga	1.331.676.000	6 Lembaga	1.350.319.464	6 Lembaga	1.354.370.422	6 Lembaga	1.363.851.015	Kelurahan Bubakan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangmalang	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangmalang**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**676.800.000**	**1 Laporan**	**705.225.600**	**1 Laporan**	**715.098.758**	**1 Laporan**	**717.244.055**	**1 Laporan**	**722.264.763**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				676.800.000		705.225.600		715.098.758		717.244.055		722.264.763	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	676.800.000	6 Lembaga	705.225.600	6 Lembaga	715.098.758	6 Lembaga	717.244.055	6 Lembaga	722.264.763	Kelurahan Karangmalang
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Polaman	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Polaman**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**559.000.000**	**1 Laporan**	**582.478.000**	**1 Laporan**	**590.632.692**	**1 Laporan**	**592.404.590**	**1 Laporan**	**596.551.422**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				559.000.000		582.478.000		590.632.692		592.404.590		596.551.422	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	559.000.000	6 Lembaga	582.478.000	6 Lembaga	590.632.692	6 Lembaga	592.404.590	6 Lembaga	596.551.422	Kelurahan Polaman
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwosari	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwosari**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.103.600.000**	**1 Laporan**	**1.149.951.200**	**1 Laporan**	**1.166.050.517**	**1 Laporan**	**1.169.548.668**	**1 Laporan**	**1.177.735.509**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.103.600.000		1.149.951.200		1.166.050.517		1.169.548.668		1.177.735.509	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.103.600.000	6 Lembaga	1.149.951.200	6 Lembaga	1.166.050.517	6 Lembaga	1.169.548.668	6 Lembaga	1.177.735.509	Kelurahan Purwosari
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambangan	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambangan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**829.800.000**	**1 Laporan**	**864.651.600**	**1 Laporan**	**876.756.722**	**1 Laporan**	**879.386.993**	**1 Laporan**	**885.542.702**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				829.800.000		864.651.600		876.756.722		879.386.993		885.542.702	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	829.800.000	6 Lembaga	864.651.600	6 Lembaga	876.756.722	6 Lembaga	879.386.993	6 Lembaga	885.542.702	Kelurahan Tambangan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonolopo	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonolopo**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2.710.600.000**	**1 Laporan**	**2.824.445.200**	**1 Laporan**	**2.863.978.433**	**1 Laporan**	**2.872.579.395**	**1 Laporan**	**2.892.667.451**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.710.600.000		2.824.445.200		2.863.978.433		2.872.579.395		2.892.667.451	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.710.600.000	6 Lembaga	2.824.445.200	6 Lembaga	2.863.978.433	6 Lembaga	2.872.579.395	6 Lembaga	2.892.667.451	Kelurahan Wonolopo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mijen	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mijen**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2.261.600.000**	**1 Laporan**	**2.356.587.200**	**1 Laporan**	**2.389.579.421**	**1 Laporan**	**2.396.748.159**	**1 Laporan**	**2.413.525.396**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.261.600.000		2.356.587.200		2.389.579.421		2.396.748.159		2.413.525.396	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.261.600.000	6 Lembaga	2.356.587.200	6 Lembaga	2.389.579.421	6 Lembaga	2.396.748.159	6 Lembaga	2.413.525.396	Kelurahan Mijen
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatibarang	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatibarang**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**917.000.000**	**1 Laporan**	**955.514.000**	**1 Laporan**	**968.891.196**	**1 Laporan**	**971.797.870**	**1 Laporan**	**978.600.455**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				917.000.000		955.514.000		968.891.196		971.797.870		978.600.455	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	917.000.000	6 Lembaga	955.514.000	6 Lembaga	968.891.196	6 Lembaga	971.797.870	6 Lembaga	978.600.455	Kelurahan Jatibarang
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2.016.400.000**	**1 Laporan**	**2.101.088.800**	**1 Laporan**	**2.130.504.043**	**1 Laporan**	**2.136.895.555**	**1 Laporan**	**2.151.853.824**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kedungpane	**di Kelurahan Kedungpane**												
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.016.400.000		2.101.088.800		2.130.504.043		2.136.895.555		2.151.853.824	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.016.400.000	6 Lembaga	2.101.088.800	6 Lembaga	2.130.504.043	6 Lembaga	2.136.895.555	6 Lembaga	2.151.853.824	Kelurahan Kedungpane
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngadirgo	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngadirgo**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2.228.800.000**	**1 Laporan**	**2.322.409.600**	**1 Laporan**	**2.354.923.334**	**1 Laporan**	**2.361.988.104**	**1 Laporan**	**2.378.522.021**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.228.800.000		2.322.409.600		2.354.923.334		2.361.988.104		2.378.522.021	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2.228.800.000	6 Lembaga	2.322.409.600	6 Lembaga	2.354.923.334	6 Lembaga	2.361.988.104	6 Lembaga	2.378.522.021	Kelurahan Ngadirgo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonoplumbon	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonoplumbon**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.353.000.000**	**1 Laporan**	**1.409.826.000**	**1 Laporan**	**1.429.563.564**	**1 Laporan**	**1.433.852.255**	**1 Laporan**	**1.443.889.220**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.353.000.000		1.409.826.000		1.429.563.564		1.433.852.255		1.443.889.220	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.353.000.000	6 Lembaga	1.409.826.000	6 Lembaga	1.429.563.564	6 Lembaga	1.433.852.255	6 Lembaga	1.443.889.220	Kelurahan Wonopolumbon
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatisari	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatisari**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**5.206.800.000**	**1 Laporan**	**5.425.485.600**	**1 Laporan**	**5.501.442.398**	**1 Laporan**	**5.517.946.726**	**1 Laporan**	**5.556.572.353**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.206.800.000		5.425.485.600		5.501.442.398		5.517.946.726		5.556.572.353	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	5.206.800.000	6 Lembaga	5.425.485.600	6 Lembaga	5.501.442.398	6 Lembaga	5.517.946.726	6 Lembaga	5.556.572.353	Kelurahan Jatisari
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pesantren	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pesantren**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.920.800.000**	**1 Laporan**	**2.001.473.600**	**1 Laporan**	**2.029.494.230**	**1 Laporan**	**2.035.582.713**	**1 Laporan**	**2.049.831.792**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.920.800.000		2.001.473.600		2.029.494.230		2.035.582.713		2.049.831.792	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	1.920.800.000	6 Lembaga	2.001.473.600	6 Lembaga	2.029.494.230	6 Lembaga	2.035.582.713	6 Lembaga	2.049.831.792	Kelurahan Pesantren
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	**Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan**	**100,00%**	**100,00%**	**5.774.770**	**100,00%**	**6.063.510**	**100,00%**	**6.245.414**	**100,00%**	**6.289.132**	**100,00%**	**6.396.047**	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga				5.774.770		6.063.510		6.245.414		6.289.132		6.396.047	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kemasyarakatan													
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.774.770	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.063.510	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.245.414	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.289.132	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.396.047	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	**Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	**100,00%**	**100,00%**	**7.000.000**	**100,00%**	**7.350.000**	**100,00%**	**7.570.500**	**100,00%**	**7.623.494**	**100,00%**	**7.753.093**	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7.000.000		7.350.000		7.570.500		7.623.494		7.753.093	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.350.000	12 Laporan	7.570.500	12 Laporan	7.623.494	12 Laporan	7.753.093	

Untuk selanjutnya, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2025-2030, Kecamatan MIjen berupaya untuk meningkatkan optimalisasi sumber pendapatan melalui retribusi pemakaian aula Kecamatan Mijen Kota Semarang. Proyeksi pendapatan dari retribusi aula Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 - 2030 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2026 – 2030

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Baseline 2024 (Rp)	Target Pendapatan Tahun					Keterangan
			2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah							
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Aula Kecamatan Mijen	1.572.000	6.600.000	7.260.000	7.986.000	8.784.600	9.663.060	

Sumber: Kecamatan Mijen 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur

kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Mijen Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mijen yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Kinerja layanan Kecamatan Mijen	Angka	95,00	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	
Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	
Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan	Angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Sumber: Kecamatan Mijen 2025

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Unsur Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Mijen 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan unsur penunjang kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Mijen Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Permasalahan belum optimalnya kualitas kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pemerintahan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Mijen Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

44. KECAMATAN GENUK

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang maka Kecamatan Genuk wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan H Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Periode

Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Kecamatan Genuk, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Genuk Kota Semarang.

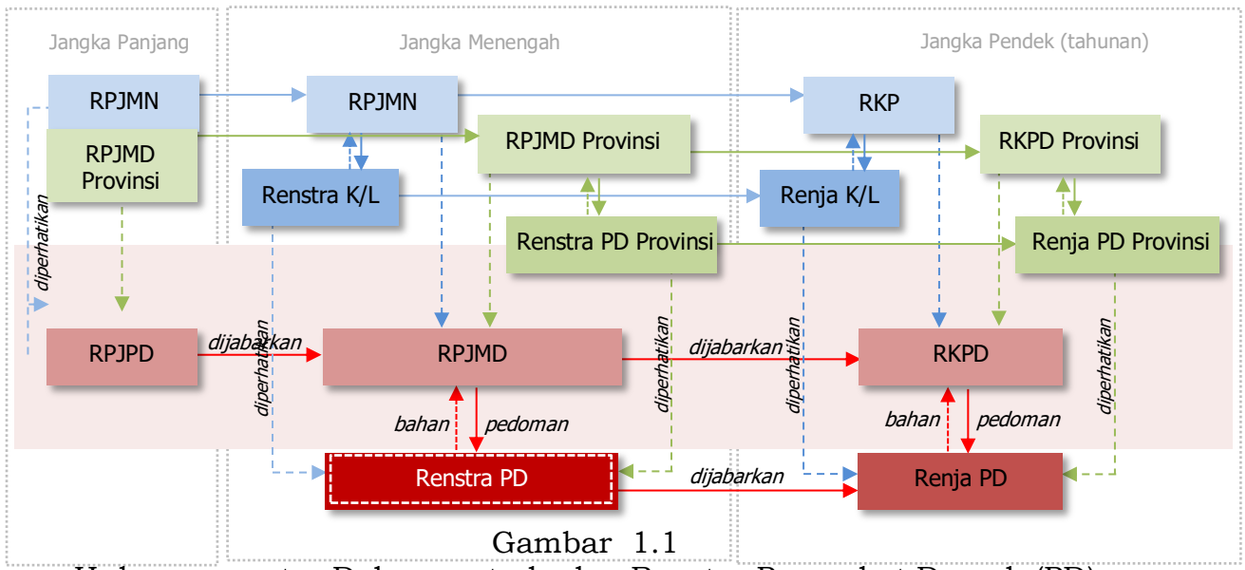

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025
27. Surat Keputusan Camat Genuk Kota Semarang Nomor B/050/16/IV/2025 Tahun 2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya unsur kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;

3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Genuk Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Genuk Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

2.1. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GENUK

Kecamatan Genuk mempunyai luas 2.775,59 Ha yang mencakup 13 (tiga belas) Kelurahan, Adapun 13 kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Sembungharjo dengan luas 250,350 Ha; Kelurahan Kudu dengan luas 183,929 Ha ha; Kelurahan Karangroto dengan luas 214,700 Ha; Kelurahan Genuksari dengan luas 244,500 Ha; Kelurahan Gebangsari dengan luas 149,790 Ha; Kelurahan Muktiharjo Lor dengan luas 117,286 Ha; Kelurahan Penggaron Lor dengan luas 154,174 Ha; Kelurahan Banjardowo dengan luas 324,160 Ha; Kelurahan Bangetayu Kulon dengan luas 178,540 Ha; Kelurahan Bangetayu Wetan dengan luas 185,296 Ha; Kelurahan Terboyo Kulon dengan luas 197,501 Ha; Kelurahan Terboyo Wetan dengan luas 243,000 Ha; Kelurahan Trimulyo dengan luas 332,364 Ha Dengan Batas wilayah Kecamatan Genuk meliputi :

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Kabupaten Demak
Sebelah Selatan : Kecamatan Pedurungan
Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari

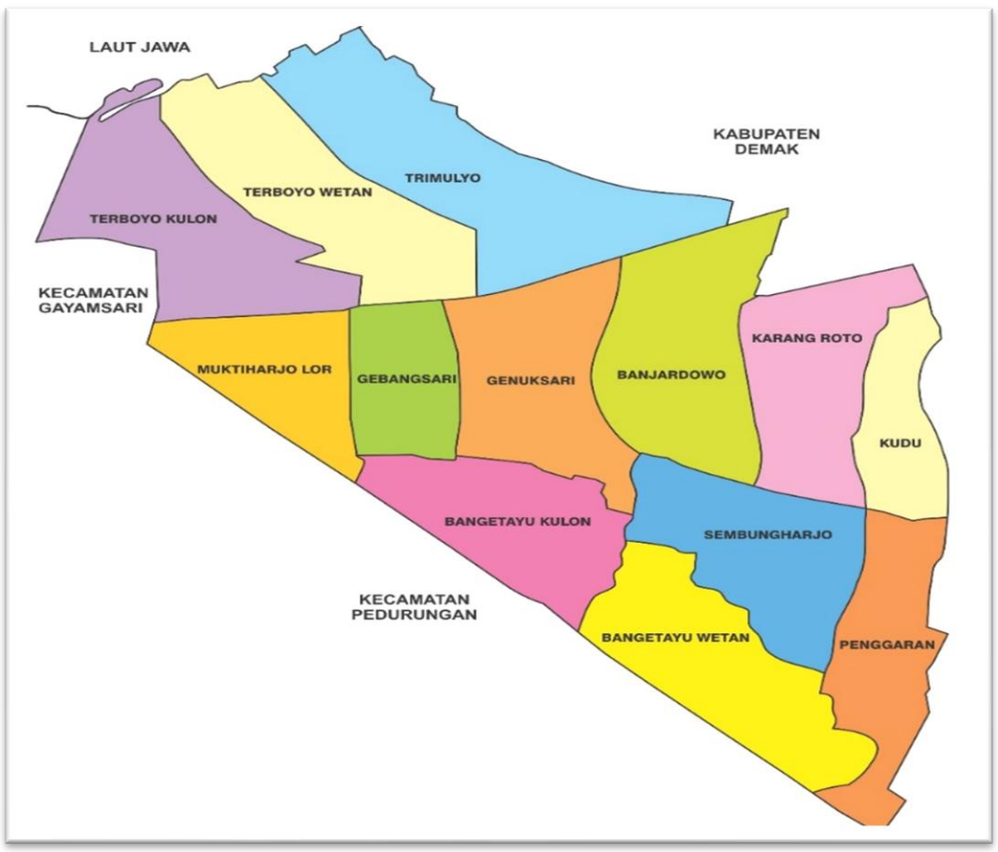

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kecamatan Genuk

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Tugas dan Fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Genuk bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; dimana disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Genuk menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
9. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
11. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
12. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
13. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

14. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Genuk telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Camat
   Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Sekretariat
   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.
   Sekretariat terdiri atas :
   1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
   2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan
   Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.
4. Seksi Pembangunan
   Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
   Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
6. Seksi Pelayanan Publik
   Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

7. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
   Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.
8. Jabatan Fungsional
   Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kelurahan

1. Lurah
   Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Sekretariat Kelurahan
   Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Seksi Pembangunan Kelurahan
   Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.
4. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
   Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.
5. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum
   Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Camat Genuk Kota Semarang.

Susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Kecamatan Genuk Kota Semarang dapat diihat pada Gambar 2.2 berikut ini :

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

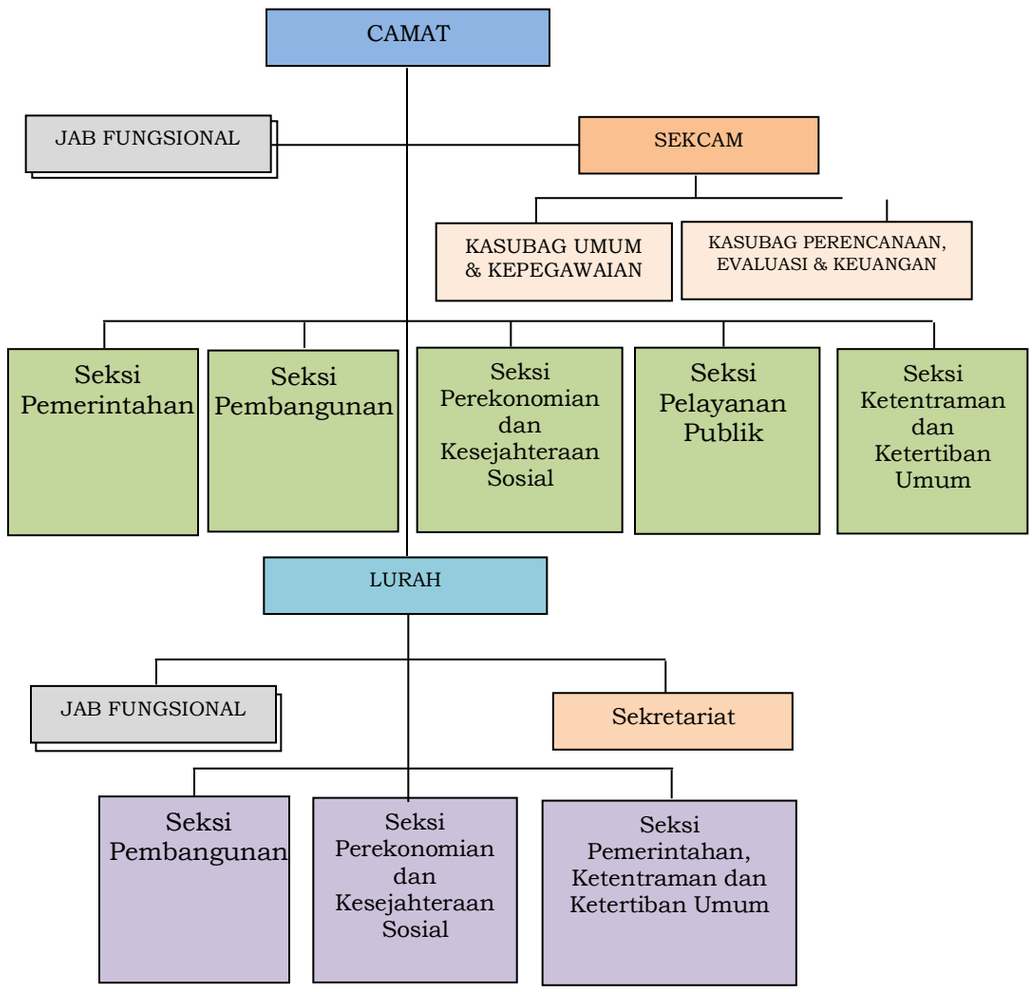

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Genuk Kota Semarang
(Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023)

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Genuk

Adapun untuk Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Genuk yaitu sebagai berikut:

1. Camat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

a) perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
b) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
c) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
d) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
e) penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
f) penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
g) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
h) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
j) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
k) penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
l) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
m) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
n) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
o) penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
p) penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
q) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
r) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
s) penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Genuk menyelenggarakan fungsi :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   d) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   e) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
   g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
   h) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
   b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
   d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
   a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang

undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan

b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
   a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   b) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   c) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   d) evaluasi Kelurahan.
9) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
   a) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
   b) Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   c) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   d) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   e) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
   f) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
   g) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;

h) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
i) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
j) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
k) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
l) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
b) penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
c) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
d) pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan.

11) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
a) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
b) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
c) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
d) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
e) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

13) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
b) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
c) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

14) Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
7) pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
8) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
9) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
10) pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
11) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
12) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
13) pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
14) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
15) pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
16) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
17) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
18) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
19) pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
20) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
21) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
22) pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;

23) pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
24) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
25) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
26) pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
27) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
28) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
29) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
30) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
6) menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
7) menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
10) menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
11) menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
13) menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;

14) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
17) menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
20) menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
22) menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
24) menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
25) menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
26) menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
27) menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
28) menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
29) menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
30) menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
32) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
34) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
35) menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;

36) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
37) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan; mm.menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
39) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
40) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
41) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
6) menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
9) menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
10) menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
11) menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16) menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
17) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
18) menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);

20) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
21) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
22) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
24) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
25) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
28) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
29) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
30) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
32) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
33) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
8) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
11) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi,

kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);

12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
13) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
14) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia; r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
20) menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
21) menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
22) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
23) menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
24) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
25) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
26) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
27) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
28) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
29) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
30) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
31) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
32) menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

33) menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
34) menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
35) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
36) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
37) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; mm.menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
39) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
40) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
41) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
42) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
6) menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
7) menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
8) menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
11) menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
12) menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
14) menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

15) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
16) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
17) menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
18) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
19) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
20) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
21) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
22) menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
24) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
26) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
27) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;

11) menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
20) menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
21) menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
25) menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
28) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
29) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
30) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan

32) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
34) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
35) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
37) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
38) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
39) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
40) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2) pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
9) pelaksanaan kegiatan koordinasi;
10) pelaksanaan kegiatan sekretariat;
11) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
12) pelaksanaan kegiatan pembangunan;
13) pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
14) pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
15) pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
16) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
17) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
18) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
19) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
20) pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
21) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
   3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   4) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   5) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
   2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
   3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
   4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
   1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
   3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   2) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   3) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   4) evaluasi Kelurahan;

i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
   1) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   2) peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   3) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   4) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   5) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
   6) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
   7) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
   8) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;

9) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
10) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
2) penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
3) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
4) Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
2) peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3) penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
4) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
5) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;

n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan

o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Genuk Kota Semarang

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Genuk Kota Semarang pada Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 95 pegawai, yang terdiri dari 94 Pegawai Negeri Sipil dan 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dengan jumlah 51 pegawai laki – laki (36,46%) dan 44 pegawai perempuan (31,65%). Selain itu juga terdapat pegawai Non ASN

sebanyak 44 pegawai, yang terdiri dari 38 pegawai laki-laki (27,34%) dan 6 pegawai perempuan (4,32%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebanyak 139 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Kecamatan Genuk didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 dan S1 sebanyak 60 orang (43,17 %), D3 sebanyak 28 orang (20,14%), dan lulusan SMA sebanyak 7 orang (5,04%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 2 Orang (1,44%) lulusan SMP, 24 Orang (17,27%) lulusan SMA, 3 Orang (2,16%) lulusan D3 dan sisanya sebanyak 15 orang (10,79%) merupakan lulusan S1. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Genuk Kota Semarang
Tahun 2024
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	2	0	2
3	SMA Sederajat	4	3	24	0	31
4	D3	8	20	2	1	31
5	S1	30	17	10	5	62
6	S2	9	4	0	0	13
7	S3	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, per Desember 2024

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 6 pegawai (6,32%), golongan III sebanyak 65 pegawai (68,42%), golongan II sebanyak 23 pegawai (24,21%), dan golongan VII (PPPK) sebanyak 1 pegawai (1,05%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah ASN Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	9	16	23
2	Golongan III	37	26	65
3	Golongan IV	5	1	6
4	Golongan VII (PPPK)	0	1	1

Sumber: Kecamatan Genuk Kota Semarang, per Desember 2024

b. Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Genuk Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Aset Tanah Kecamatan Genuk

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Kaveling (dst)	150	1985	Jl. Muktiharjo Raya	Hak Pakai	14/12/2007	HP 3	Rumah Dinas	Pembelian	42.000.000	
2	Tanah Bangunan Industri Alat RT	1.868	1993	Gebangsari RT 02 RW V	Hak Pakai	17/11/2005	HP 3	Kantor dan Balai Kelurahan	Pembelian	308.220.000	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.375	1977	Jl. Kaligawe-Demak	Hak Pakai	-	HP 1	Kantor Koramil 0733-06	Pembelian	2.750.000.000	Sudah Dihibahkan ke Koramil
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	430	1985	Jl. Muktiharjo Raya	Hak Pakai	14/12/2007	HP 3	Kantor Kelurahan	Pembelian	119.000.000	
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.000	1986	Kudu RT 05/RW 04	Hak Pakai	14/12/2022	HP 176	Kantor Kelurahan	Pembelian	50.000.000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.07.13.00
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	26.070	1993	Jl. Widoro Raya RT 03/RW 04	Hak Pakai	27/07/2006	HP 1	Kantor dan Balai Kelurahan Sembungharjo	Pembelian	640.000.000	
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	424	1993	Kawasan Industri Terboyo	Hak Pakai	30/04/2007	HP 2	Kantor dan Balai kelurahan	Pembelian	394.000.000	
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.050	1993	Jl. Dongbiru RT 03/RW 03	Hak Pakai	30/04/2007	HP 6	Balai Pertemuan	Pembelian	192.000.000	
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20.000	1993	Banjardowo RT.06/RW.III	-	-	-	Lapangan	Pembelian	1.500.000.000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.07.14.00
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	435	1997	Jl. Arteri Utara RT 01/RW 02	Hak Pakai	21/11/2023	HP 17 dan HP 18	Balai Kel, Kantor & Rumdin Terboyo Kulon	Pembelian	332.775.000	Tukar Guling dgn PT Siba Surya - Lain-Lain - 50.07.03.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	289	2011	Jalan Pasar Genuksari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 10	Kantor Kelurahan Genuksari	Pembelian	160.000.000	
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.827	2011	Jl. Dong Biru RT 03/RW 03	Hak Pakai	30/04/2007	HP 8	Kantor dan Rumah Dinas	Pembelian	640.000.000	
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	420	2011	Jl. Pasar Genuksari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 12	Kantor KUA	Pembelian	236.000.000	
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	425	2011	Jalan Raya Pasar Genuksari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 11	TK Pertiwi	Pembelian	149.000.000	
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.538	2011	Jl. Raya Wolter Monginsidi No 1	Hak Pakai	22/11/2005	HP 4	Kantor dan Balai Kelurahan	Pembelian	845.000.000	
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.951	1979	Jl. Zaenudin Raya	Hak Pakai	14/12/2007	21	Kantor Kelurahan	Pembelian	23.608.000	
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	1979	Jl. Raya Kudu No. 2 RT.01 RW. 01	Hak Pakai	29/12/2005	1	Kantor Kelurahan	Pembelian	7.500.000	
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	372	1979	Jl. Kaumandowo RT. 05 RW. 04 Kel. Kudu Kec. Genuk	Hak Pakai	28 April 2016	8	Rumah Dinas	Pembelian	10.044.000	
19	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	927	2011	Jl. Alas Tuo Bangetayu Wetan	Hak Pakai	04/06/2007	HP 6	TK Al-Hidayah	Pembelian	371.000.000	
20	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	530	1985	Jl. Muktiharjo Raya	Hak Pakai	14/12/2007	HP 3	Balai Pertemuan	Pembelian	112.500.000	
21	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	150	1985	Jl. Muktiharjo Raya	Hak Pakai	14/12/2007	HP 3	Gedung PKK	Pembelian	45.500.000	
22	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	78	2011	Jalan. Raya Pasar Genuksari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 13	Gedung PKK	Pembelian	28.000.000	
23	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	4.414	2007	Karangroto	Hak Pakai	12/09/2007	HP 20	Kantor dan Balai Kelurahan	Pembelian	1.108.000.000	
24	Tanah Tegalan	13.760	2011	Banjardowo RW. I	Hak Pakai	15/12/2011	HP 22	Pertanian/Pasar	Pembelian	697.500.000	
25	Tanah Tegalan	17.574	2011	Banjardowo RW.V	Hak Pakai	15/12/2011	HP 20	Tanah Pertanian	Pembelian	837.500.000	
26	Tanah Tegalan	9.793	2011	Banjardowo RW.V	Hak Pakai	15/12/2011	HP 21	Tanah Pertanian	Pembelian	590.000.000	
27	Tanah Tegalan	10.953	1977	Banjardowo RT 01/RW 08	Hak Pakai	07/06/2007	HP 10	Tanah Pertanian	Pembelian	547.650.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
28	Tanah Tegalan	8.714	1977	Banjardowo RT 01/RW 08	Hak Pakai	30/04/2007	HP 2	Tanah Pertanian	Pembelian	435.700.000	
29	Tanah Tegalan	9.615	1977	Banjardowo RT 02/RW 08	Hak Pakai	30/04/2007	HP 5	Tanah Makam	Pembelian	480.750.000	
30	Tanah Tegalan	4.796	1977	Banjardowo RT 02/RW08	Hak Pakai	30/04/2007	HP 3	Tanah Makam	Pembelian	239.800.000	
31	Tanah Tegalan	6.224	1977	Kp. Tanggulangin	Hak Pakai	30/04/2007	HP 4	Tanah Pertanian	Pembelian	311.200.000	
32	Tanah Tegalan	18.654	1977	Kp. Tanggulangin	Hak Pakai	30/04/2007	HP 13	Tanah Pertanian	Pembelian	932.700.000	
33	Tanah Tegalan	4.385	1977	Kp. Tanggulangin	Hak Pakai	30/04/2007	HP 14	Tanah Pertanian	Pembelian	219.250.000	
34	Tanah Tegalan	10.576	1977	Kp. Tanggulangin	Hak Pakai	30/04/2007	HP 15	Tanah Pertanian	Pembelian	528.800.000	
35	Tanah Tegalan	1.300	1977	Banjardowo RW. V	-	-	-	Tanah Tegalan	Pembelian	665.000.000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.07.14.00
36	Tanah Tegalan	1.750	1977	Banjardowo RW. V	-	-	-	Tanah Tegalan	Pembelian	87.500.000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.07.14.00
37	Tanah Tegalan	7.900	1982	Bangetayu Wetan RT.05/RW.V	-	-	-	Tanah Tegalan	Pembelian	647.800.000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.07.12.00
38	Tanah Tegalan	9.600	1982	Bangetayu Wetan RT.05/RW.I	-	-	-	Tanah Tegalan	Pembelian	787.200.000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.07.12.00
39	Tanah Tegalan	35.764	1993	Kp. Sembungharjo RT 04/RW 01	Hak Pakai	12/09/2007	HP 6	Tegalan (Petanian)	Pembelian	1.674.000.000	
40	Tanah Tegalan	28.161	1993	Kp. Sembungharjo RT 04/RW 01	Hak Pakai	12/09/2007	HP 5	Tegalan (Pertanian)	Pembelian	170.640.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
41	Tanah Tegalan	4.000	1993	Jl. Sembungharjo	-	-	-	Tegalan	Pembelian	328.000.000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.07.02.00
42	Tanah Tegalan	14.030	1993	Trimulyo RT 01/Rw III	Hak Pakai	22/05/2020	HP 8	Lapangan Sepak Bola	Pembelian	1.265.555.000	
43	Tanah Tegalan	1.164	1993	Trimulyo RT 01/ RW III	Hak Pakai	26/01/2006	HP 6	Kantor dan Balai Kel.	Pembelian	240.000.000	
44	Tanah Tegalan	300	1993	Trimulyo RT 02/ RW 01	Hak Pakai	22/05/2020	HP 12	Gedung ex-BKK	Pembelian	48.000.000	
45	Tanah Tegalan	300	1993	Trimulyo RT 02/ RW II	Hak Pakai	22/05/2020	HP 12	Gedung PKK	Pembelian	48.000.000	
46	Tanah Tegalan	500	1993	Trimulyo RT 02/ RW II	Hak Pakai	22/05/2020	HP 12	GOR	Pembelian	80.000.000	
47	Tanah Tegalan	458	1993	Trimulyo RW II	Hak Pakai	22/05/2020	HP 10	Lapangan	Pembelian	114.300.000	
48	Tanah Tegalan	2.500	1993	Gebangsari RT 02 Rw IX	-	-	-	Tanah kosong	Pembelian	420.000.000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.07.11.00
49	Tanah Tegalan	5.690	1993	Gebangsari RT 02 RW V	-	-	-	Tanah Kosong	Pembelian	955.920.000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.07.11.00
50	Tanah Tegalan	4.886	1993	Jl. Banjardowo-Karangroto	Hak Pakai	30/04/2007	HP 9	Gudang Terpadu Banjardowo (Aset)	Pembelian	1.221.500.000	
51	Tanah Tegalan	1.566	1993	Jl. Banjardowo-Karangroto	Hak Pakai	30/04/2007	HP 6	Kantor Kelurahan	Pembelian	389.000.000	
52	Tanah Tegalan	3.361	1993	Jl. Banjardowo-Karangroto	Hak Pakai	30/04/2007	HP 7	Tanah Pertanian	Pembelian	336.100.000	
53	Tanah Tegalan	4.467	1993	Jl. Banjardowo-Karangroto	Hak Pakai	30/04/2007	HP 8	Tanah Pertanian	Pembelian	1.116.750.000	
54	Tanah Tegalan	10.006	1993	Kp. Tanggulangin	Hak Pakai	30/04/2007	HP 17	Tanah Pertanian	Pembelian	750.450.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
55	Tanah Tegalan	6.875	1993	Kp. Tanggulangin	Hak Pakai	30/04/2007	HP 19	Tanah Pertanian	Pembelian	515.625.000	
56	Tanah Tegalan	7.500	1993	Kp. Tanggulangin	Hak Pakai	30/04/2007	HP 18	Tanah Pertanian	Pembelian	562.500.000	
57	Tanah Tegalan	3.523	1993	Banjardowo RT.01/RW.VIII	Hak Pakai	30/04/2007	HP 12	Tanah Pertanian	Pembelian	528.450.000	
58	Tanah Tegalan	1.624	1993	Banjardowo RT.01/RW.VIII	Hak Pakai	30/04/2007	HP 11	Tanah Pertanian	Pembelian	243.600.000	
59	Tanah Tegalan	1.412	1995	Jl. Almansur	Hak Pakai	30/04/2007	HP 3	Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	Pembelian	833.800.000	
60	Tanah Tegalan	4.860	2011	Bangetayu Kulon rt 7 rw 3	Hak Pakai	04/06/2007	HP 6	Pertanian	Pembelian	147.000.000	
61	Tanah Tegalan	1.291	2011	Jl. Kampung Sembungharjo RT 12/RW 3	Hak Pakai	04/06/2007	HP 8	Pertanian	Pembelian	98.000.000	
62	Tanah Tegalan	1.680	2011	Jl. Kampung Sembungharjo RT 12/RW 03	Hak Pakai	04/06/2007	HP 7	Pertanian	Pembelian	186.000.000	
63	Tanah Tegalan	7.987	2012	Banjardowo RW. II	Hak Pakai	09/02/2012	HP 23	Lap. Olah Raga	Pembelian	485.000.000	
64	Tanah Tegalan	6.455	2012	Banjardowo RW. II	Hak Pakai	09/02/2012	HP 25	Lap. Olah Raga	Pembelian	390.000.000	
65	Tanah Tegalan	23.001	2012	Banjardowo RW. III	Hak Pakai	09/02/2012	HP 24	Tanah Pertanian	Pembelian	1.040.000.000	
66	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.684	1993	Jl. Dongbiru RT 03/RW 03	Hak Pakai	04/06/2007	HP 14	Tanah Pertanian	Pembelian	392.000.000	
67	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12.865	1995	Jl. Jempono	Hak Pakai	04/06/2007	HP 5	Pertanian	Pembelian	328.000.000	
68	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	13.057	2009	Jl. Karangroto - Kudu	Hak Pakai	07/06/2007	HP 14	Tanah Tegalan	Pembelian	2.561.152.450	
69	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.301	2009	Jl. Karangroto - Kudu	Hak Pakai	30/04/2007	HP 7	Kantor ex-Kudu	Pembelian	595.784.150	
70	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4.764	2009	Jl. Karangroto - Kudu	Hak Pakai	12/09/2007	HP 16	Lapangan	Pembelian	575.500.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
71	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12.914	2009	Karangroto	Hak Pakai	30/04/2007	HP 2	Tanah Tegalan	Pembelian	914.800.000	
72	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	232	2009	Karangroto	Hak Pakai	30/06/2007	HP 13	Pembuangan Sampah	Pembelian	41.700.000	
73	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	9.661	2009	Karangroto RT 01/ RW 03	Hak Pakai	07/06/2007	HP 10	Tanah Tegalan	Pembelian	1.162.300.000	
74	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	8.112	2009	Karangroto RT.01/RW.III	Hak Pakai	07/06/2007	HP 11	Tanah Tegalan	Pembelian	891.500.000	
75	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3.523	2009	Karangroto RT 01/ RW 03	Hak Pakai	12/09/2007	HP 19	Tanah Makam	Pembelian	182.600.000	
76	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.905	2011	Jl. Ki Dalem Dk Sambiroto RT 3/RW 6	Hak Pakai	30/04/2007	HP 3	Tanah Kosong	Pembelian	365.000.000	
77	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.190	2011	Jl. Kauman Dowo Raya RT 5/RW 4	Hak Pakai	04/06/2007	HP 4	Tanah Kosong	Pembelian	384.000.000	
78	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3.271	2010	Karangroto RT 01/RW 03	Hak Pakai	07/06/2007	HP 8	Tanah Tegalan	Pembelian	334.200.000	
79	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	11.011	2007	Jl. Zaenudin	Hak Pakai	12/09/2007	HP 18	Lapangan Sepak Bola	Pembelian	2.484.300.000	
80	Tanah Tandus lainnya	15.082	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's tambak	Pembelian	1.281.970.000	Abrasi
81	Tanah Tandus lainnya	8.965	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's Tambak	Pembelian	2.667.088.000	Abrasi
82	Tanah Tandus lainnya	16.676	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's Tambak	Pembelian	4.252.380.000	Abrasi
83	Tanah Tandus lainnya	53.240	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's tambak	Pembelian	13.576.200.000	Abrasi
84	Tanah Tandus lainnya	44.450	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's Tambak	Pembelian	11.334.750.000	Abrasi
85	Tanah Tandus lainnya	12.600	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's Tambak	Pembelian	3.213.000.000	Abrasi
86	Tanah Tandus lainnya	8.250	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's tambak	Pembelian	2.454.375.000	Abrasi
87	Tanah Tandus lainnya	10.310	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's Tambak	Pembelian	3.067.225.000	Abrasi

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
88	Tanah Tandus lainnya	19.640	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's Tambak	Pembelian	5.008.200.000	Abrasi
89	Tanah Tandus lainnya	5.730	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's Tambak	Pembelian	487.050.000	Abrasi
90	Tanah Tandus lainnya	19.350	2011	Kel Trimulyo, Kec Genuk	-	-	-	ex's Tambak	Pembelian	4.934.250.000	Abrasi
91	Tanah Lapangan Sepak Bola	12.028	1993	Jl. Sembungharjo-Kudu RT 04/RW 07	Hak Pakai	24/08/2007	HP 4	Lap. Sepak Bola	Pembelian	1.200.000.000	
92	Tanah Lapangan Sepak Bola	35.764	1997	Jl. Dongbiru RT 03/RW 03	Hak Pakai	24/08/2007	HP 15	Tanah Lapangan	Pembelian	1.238.225.000	
93	Tanah Lapangan Sepak Bola	3.328	2011	Jl. Ki Dalem Dk Sambiroto RT 5/RW 6	Hak Pakai	12/09/2007	HP 7	Lapangan Olah Raga	Pembelian	467.000.000	
94	Tanah Lapangan Sepak Bola	7.641	2011	Jl. Kauman Dowo Raya RT 05/RW 04	Hak Pakai	24/08/2007	HP 5	Lapangan Olah Raga	Pembelian	1.150.000.000	
95	Tanah Lapangan Sepak Bola	2.560	2012	Kp. Sembungharjo RT.02/RW.03	Hak Pakai	09/02/2012	HP 9	Lap. Sepak Bola	Pembelian	254.200.000	
96	Tanah Lapangan Sepak Bola	502	2012	Kp. Sembungharjo RT 02/RW 03	Hak Pakai	09/02/2012	HP 9	Lap. Sepak Bola	Pembelian	43.460.000	
97	Tanah Lapangan Sepak Bola	5.615	2012	Kp. Sembungharjo RT 02/RW03	Hak Pakai	09/02/2012	HP 9	Lap. Sepak Bola	Pembelian	512.500.000	
98	Tanah Lapangan Sepak Bola	2.560	2012	Kp. Sembungharjo RT 02/RW 03	Hak Pakai	09/02/2012	HP 9	Lap. Sepak Bola	Pembelian	254.200.000	
99	Tanah Lapangan Bola Volly	831	2011	Jl. Raya Pasar Genuksari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 9	Lapangan Volly	Pembelian	436.000.000	
100	Tanah Lapangan Lainnya	1.200	1985	Jl. Muktiharjo Raya	Hak Pakai	14/12/2007	HP 3	Halaman Kantor	Pembelian	332.500.000	
101	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	99.986	2000	Jl. Arteri - Terboyo Kulon	Hak Pakai	17/04/2000	HP 1	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Pembelian	699.902.001	
102	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	36.249	1999	Dk. Sambiroto RT 03 & 04 /RW 06	Hak Pakai	24/08/2007	HP 6	Tanah Pertanian	Pembelian	45.000.000	
103	Tanah Untuk Makam Umum	13.346	1993	Kp. Tanggulangin	Hak Pakai	30/04/2007	HP 16	Tanah Makam	Pembelian	1.000.950.000	

Tabel 2.4
Gedung dan Bangunan Kecamatan Genuk

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	372	Jl. Dong Biru No. 12	372	Tanah Milik Pemda	Pembelian	875.036.000	50.07.01.00 (Kantor Kecamatan Genuk Tahap I)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	917,63	Jl. Dong Biru No 12	917,63	Tanah Milik Pemda	Pembelian	751.930.000	50.07.01.00 (Ktr UPT, Cmt Tahap II, Paving Halaman)
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	385	Jl Dong Biru No 12	385	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.396.565.980	50.07.01.00 (Aula, Rumdin, Mushola)
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	65,1	Jl. Dong Biru No. 12	65,1	Tanah Milik Pemda	Pembelian	197.746.650	Gedung Pusat Pembelajaran (BLC) Tahun 2017
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	111	Trimulyo RT 20 RW 04, Genuk	111	Tanah Milik Pemda	Pembelian	157.411.420	Dari Distaru
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	245	Genuksari	245	Tanah Milik Pemda	Pembelian	388.556.801	Dari Distaru
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	10	Gebangsari RT 01,02,03 RW 09	10	Tanah Milik Pemda	Pembelian	82.000.000	Reklas Barang Jasa Ke modal 2017. Pembangunan Gedung Posyandu
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	10	Jl. Kapas Timur RT 04 RW 08	10	Tanah Milik Pemda	Pembelian	80.000.000	Reklas Barang Jasa Ke modal 2017. Pembangunan Gedung Posyandu
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	50	Jl Kudu RT 03 RW 06	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	150.000.000	Reklas Barang Jasa Ke modal 2017. Pembangunan Balai RW 06
10	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Baik	36	Jalan Dong Biru No II Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk	36	Tanah Milik Pemda	Pembelian	207.663.689	Mutasi Dari DLH
11	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	12,5	Jl. KH Zainudin Raya RT 8 RW 1 Karangroto Kecamatan Genuk	12,5	Tanah Milik Pemda	Pembelian	96.782.530	Dari Distaru tahun 2019

12	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	4,73	Gebangsari, Kecamatan Genuk	4,73	Tanah Milik Pemda	Pembelian	202.277.324	Dari Distru thn 2019
13	Bangunan Posyandu	Baik	20	Jl. Trimulyo RT 02 RW 02 Kel. Trimulyo	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	70.801.000	Gedung Posyandu 2020
14	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	63	Kampung Tematik Kel. Muktiharjo Lor	63	Tanah Milik Pemda	Pembelian	156.953.689	Pemb. Balai RW 02, Jl. Sendang Indah Raya RT 01 RW 02 Pemb. Balai RW 02, Jl. Sendang Indah Raya RT 01 RW 02 kel.muktiharjo lor. kel.muktiharjo lor. Kampung Tematk. (Hasil Reklas Salah Anggaran)
15	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	369	Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk	369	Tanah Milik Pemda	Pembelian	413.574.116	Dari Distaru
16	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	10,08	Gebangsari RT 01,02,03 RW 09 Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk	10,08	Tanah Milik Pemda	Pembelian	760.721.059	APBD 2018. Dari Distaru
17	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	731	Jl. KH Zainudin	731	Tanah Milik Pemda	Pembelian	580.042.926	Dari Distaru Tahun 2019
18	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	510	Jl. Wolter Monginsidi	510	Tanah Milik Pemda	Pembelian	260.329.740	Dari Distaru Tahun 2019
19	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	731	Jl. KH Zainudin Raya RT 8 RW 1 Karangroto	731	Tanah Milik Pemda	Pembelian	958.933.976	Dari Distaru 2019
20	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	375	Kel. Sembungharjo	375	Tanah Milik Pemda	Pembelian	94.960.000	50.07.02.00 (Lapangan Futsal)
21	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Baik	179	Jl. Dong Biru No.12	179	Tanah Milik Pemda	Pembelian	39.630.000	50.07.01.00 (Pos Jaga dan Tempat Parkir Sepeda Motor)
22	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	600	Gebangsari Rt.02/RW.05	600	Tanah Milik Pemda	Pembelian	445.500.000	50.07.11.00 (Gedung Balai)
23	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	180	Gebangsari Rt. 02/Rw.05	180	Tanah Milik Pemda	Pembelian	339.137.500	50.07.11.00 (Gedung Rumah Dinas)
24	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	15000	Jl. Ratan Cilik	15000	Tanah Milik Pemda	Pembelian	84.000.000	50.07.14.00 (Lapangan Sepak Bola)
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	141	Jl. Widoro Raya	141	Tanah Milik Pemda	Pembelian	464.882.065	50.07.02.00 (Gedung Kantor Kelurahan)
26	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	224	Jl. Widoro Raya	224	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.006.750.578	50.07.02.00 (Gedung Balai Kelurahan)
27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	108	Jl. Widoro Raya	108	Tanah Milik Pemda	Pembelian	125.720.000	50.07.02.00 (Gedung Rumah Dinas)

31	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	340	Jl.Terboyo Industri Raya No. 15 A	340	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.072.664.284	50.07.04.00 (Gedung Kantor/Balai kelurahan)
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	171	Jl. Banget Prasetya	171	Tanah Milik Pemda	Pembelian	339.305.224	50.07.05.00 (Gedung Kantor)
33	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Muktiharjo Raya	120	Tanah Milik Pemda	Pembelian	483.935.421	50.07.06.00 (Gedung Kantor Kelurahan)
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	298	Jl. Muktiharjo Raya	298	Tanah Milik Pemda	Pembelian	535.116.935	50.07.06.00 (Gedung Balai Kelurahan)
35	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	108	Jl. Muktiharjo Raya	108	Tanah Milik Pemda	Pembelian	86.400.000	50.07.06.00 (Gedung Rumah Dinas)
36	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	130	Jl. Muktiharjo Raya	130	Tanah Milik Pemda	Pembelian	264.194.000	50.07.06.00 (Gedung PKK)
37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	147	Trimulyo RT 01/RW III	147	Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.000.000	50.07.07.00 (Gedung TK)
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	77	Trimulyo RT 01/RW III	77	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.486.848.226	50.07.07.00 (Gedung Kantor Kelurahan)
39	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	50	Trimulyo RT 02/RW I	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	84.000.000	50.07.07.00 (Gedung PKK)
40	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	300	Trimulyo RT 02/RW III	300	Tanah Milik Pemda	Pembelian	845.373.830	50.07.07.00 (Gedung Olah Raga)
41	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Trimulyo RT 01/RW III	200	Tanah Milik Pemda	Pembelian	609.923.127	50.07.07.00 (Gedung Balai Kelurahan)
42	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	72	Trimulyo RT 01/RW III	72	Tanah Milik Pemda	Pembelian	143.412.420	50.07.07.00 (Gedung Rumah Dinas)
43	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	144	Karangroto RT 08/RW I	144	Tanah Milik Pemda	Pembelian	698.896.952	50.07.08.00 (Gedung Kantor Kelurahan)
44	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	264	Karangroto RT 08/RW I	264	Tanah Milik Pemda	Pembelian	738.132.705	50.07.08.00 (Gedung Balai Kelurahan)
45	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	168	Karangroto RT 08/RW I	168	Tanah Milik Pemda	Pembelian	120.000.000	50.07.08.00 (Gedung Rumah Dinas)
46	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	200	Jalan Raya Kudu No. 2 RT 01/RW I	200	Tanah Milik Pemda	Pembelian	493.496.275	50.07.09.00 (Gedung Kantor dan Balai Kelurahan)

47	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	60	Jalan Raya Kudu No. 2 RT 01/RW I	60	Tanah Milik Pemda	Pembelian	114.466.539	50.07.09.00 (Gedung Rumah Dinas)
48	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	100	Jl. Dongbiru	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	84.000.000	50.07.10.00 (Gedung Rumah Dinas)
49	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	100	Jl. Genuksari	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	577.970.500	50.07.10.00 (Gedung Kantor Kelurahan)
50	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	75	Jl. Genuksari	75	Tanah Milik Pemda	Pembelian	48.000.000	50.07.10.00 (Gedung PKK)
51	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	224	Gebangsari Rt.02/Rw.05	224	Tanah Milik Pemda	Pembelian	900.131.734	50.07.11.00 (Gedung Kantor)
52	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	250	Jl. Wolter Monginsidi RT.01/001	250	Tanah Milik Pemda	Pembelian	416.668.678	50.07.12.00 (Gedung Kantor)
53	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	270	Jl. Wolter Monginsidi RT 01/RW 01	270	Tanah Milik Pemda	Pembelian	703.374.603	50.07.12.00 (Gedung Balai Kelurahan)
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	112	Jl. Wolter Monginsidi RT 01/RW 01	112	Tanah Milik Pemda	Pembelian	115.056.161	50.07.12.00 (Gedung Rumah Dinas)
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	126	Kudu RT 05/RW 04	126	Tanah Milik Pemda	Pembelian	117.611.300	50.07.13.00 (Gedung Rumah Dinas)
58	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	1710	Jl. Ratan Cilik	1710	Tanah Milik Pemda	Pembelian	583.378.293	50.07.14.00 (Kantor Kelurahan, Balai, RM Dinas)
59	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Kurang Baik	300	Jl. Banget Prasetya	300	Tanah Milik Pemda	Pembelian	420.196.366	50.07.05.00 (Gedung Balai Kelurahan)
60	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Kurang Baik	88	Jl. Banget Prasetya	88	Tanah Milik Pemda	Pembelian	104.720.000	50.07.05.00 (Gedung PKK)
61	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	3	Kecamatan Genuk	3	Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.941.000	50.07.01.00 (Bak Sampah)
62	Makam Bersejarah	Baik	13700	Bitaran RT 3/RW 2	13700	Tanah Milik Pemda	Pembelian	71.400.000	50.07.14.00 (Makam)
63	Pagar Permanen	Baik	29,25	Jl. Kaumandowo RT 05 RW 04 Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk	29,25	Tanah Milik Pemda	Pembelian	199.702.949	APBD 2018. Dari Distaru
64	Paving Halaman Kantor Kelurahan Karangroto	Baik	582	Jalan Zainuddin Raya, Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	582	Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.332.000	APBD 2024

65	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	26	Jalan Dong Biru No 12, Genuk, Kota Semarang	26	Tanah Milik Pemda	Pembelian	137.319.600	Kantor Pos Security
66	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	75	Terboyo Kulon RT 01/RW 02 Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk	75	Tanah Milik Pemda	Pembelian	94.952.935	Pembangunan Gedung Posyandu Terboyo Kulon
67	Bangunan Tempat Pertemuan Lain Lain	Baik	37,5	Jl. Kyai H. Zainuddin Raya No.5, Karangroto, Kec. Genuk, Semarang	37,5	Tanah Milik Pemda	Pembelian	119.252.000	Kantor Kelembagaan Karangroto, Pengadaan 2024
68	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	Baik	96	RW 03, Banjardowo, Genuk	96	Tanah Milik Pemda	Pembelian	114078000	Pengadaan 2024 (Dana Musrenbang)

Sumber : Data Aset Kecamatan Genuk Kota Semarang, per Desember 2024

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Genuk Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Genuk Kota Semarang

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Pada dokumen Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Kecamatan Genuk di bidang kewilayahan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
1.	**Indikator Tujuan :**															
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	87,00	88,00	88,50	89,00	85,00	87,00	91,00	94,78	94,98	100,00%	100,00%	103,40%	107,09%	106,71%
2.	**Indikator Sasaran :**															
a.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	100,00%	-	-
b.	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
c.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	N/A	95,00%	97,00%	98,00 %	99,00%	N/A	95,00%	97,00%	98,14 %	99,02%	N/A	100,00%	100,00%	102,04%	101,01%
d.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	47,00%	-	-	N/A	N/A	47%	-	-	N/A	N/A	100%	-	-
e.	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	81,68%	83,36%	85,04%	86,72%	-	81,68%	83,36%	85,04%	86,72%	-	100,00%	100,00%	114,63%	114,90%
f.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	-	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	87,00%	90,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	108,69%	105,26%
3.	**Indikator Program :**															

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
a.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
b.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
c.	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
d.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
e.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
g.	Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
h.	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
i.	Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan RT	65,00%	90,00%	-	-	-	65,00%	90,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
j.	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	19 Bidang	19 Bidang	-	-	-	19 Bidang	19 Bidang	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
k.	Jumlah Kegiatan Penanggulangan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	-	-	-	-	3 Kelurahan	-	-	-	-	100,00%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	Kemiskinan (Gerbang Hebat)															
l.	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	344 Kegiatan	19.954 Kegiatan	-	-	-	344 Kegiatan	19.954 Kegiatan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
m.	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	53,00%	55,00%	-	-	-	53,00%	55,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
n.	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	93,81%	95,00%	-	-	-	93,81%	91,80%	-	-	-	100,00%	96,63%	-	-	-
o.	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	99,04%	99,50%	-	-	-	99,04%	99,16%	-	-	-	100,00%	99,66%	-	-	-
p.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar PATEN	85,00%	100%	-	-	-	67,00%	100%	-	-	-	78,8%	100,00%	-	-	-
q.	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	27.500 Pelayanan	477.561 Pelayanan	-	-	-	27.014 Pelayanan	477.561 Pelayanan -	-	-	-	98,23%	100,00%	-	-	-
r.	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	13 Kelurahan	13 Kelurahan	-	-	-	13 Kelurahan	13 Kelurahan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
s.	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
t.	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan	86,00%	90,00%	-	-	-	84,34%	71,11%	-	-	-	98,07%	79,01%	-	-	-
u.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	-	85,00%	91,00%	92,00%	93,00%	-	87,00%	91,00%	94,75%	94,98%	-	102,35%	100,00%	102,98%	102,12%
v.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	-	95,00%	97,00%	98,14%	99,02%	-	100,00%	100,00%	102,04%	101,01%
w.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	0,00%	10,00%	15,00%	20,00%	-	0,00%	10,00%	18,42%	26,78%	-	0,00%	100,00%	122,80%	133,90%
x.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	85,00%	90,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	108,69%	105,26%
4.	**Indikator Lainnya**															
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	N/A	72,50%	-	-	-	-	72,50%	-	-	-	N/A	100,00%	-	-	-
b.	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	-	-	11,14 %	10,52%	9,9%	-	-	10,52%	10,52%	9,9%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
c.	Nilai AKIP	69,89	71,5	72,5	73	74	73,45	73,45	73,51	76,2	76,7	105,09%	102,72%	101,39%	104,38%	103,64%

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang

Keterangan:

1	Nomor
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)
3	Satuan kinerja
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan
5	Target dari kementrian terkait misalnya
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun
11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
16	Rasio tahun pertama renstra disusun
17	Rasio tahun kedua renstra disusun
18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
19	Rasio tahun keempat renstra disusun
20	Rasio tahun kelima renstra disusun

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun}} \times 100\%$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Genuk Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Genuk. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Genuk. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Genuk. Secara rinci anggaran beserta realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaksanaan Urusan
Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	JUMLAH BELANJA	**27.761.445.000**	**49.958.118.126**	**47.770.277.213**	**54.498.751.210**	**58.566.166.000**	**26.608.901.444**	**45.746.174.035**	**46.188.024.902**	**52.402.057.668**	**54.534.637.698**	**95.84**	**91.56**	**96.68**	**96.15**	**93.07**	**24.28%**	**22.27%**
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	370.610.000	0	0	0	0	359.830.202	0	0	0	0	97,09	0	0	0	0	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	200.526.000	0	0	0	0	200.525.226	0	0	0	0	99,99	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	15.405.000	0	0	0	0	8.761.500	0	0	0	0	56,87	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	13.089.916.000	0	0	0	0	12.723.334.182	0	0	0	0	97,20	0	0	0	0	0	0
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.668.033.000	0	0	0	0	11.915.874.523	0	0	0	0	94,06	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	655.356.500	0	0	0	0	645.528.246	0	0	0	0	98,50	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	240.234.500	0	0	0	0	233.684.500	0	0	0	0	97,27	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	520.564.000	0	0	0	0	520.563.065	0	0	0	0	99,99	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Intensifikasi PAD	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	17.158.225.377	16.110.811.037	18.451.827.669	21.267.692.103	0	15.582.869.622	15.413.882.519	17.603.258.479	19.968.893.197	0	90.82	95.67	95.40	93.89	8%	9%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	14.374.794.897	2.849.442.781	2.150.772.117	3.544.107.128	0	12.911.419.323	2.661.621.286	1.888.858.858	3.200.583.622	0	89.82	93.41	90.03	90.31	-13%	-13%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	18.165.747.852	28.753.579.555	31.358.735.544	33.542.598.339	0	17.007.748.324	28.078.173.097	30.587.010.241	31.487.516.566	0	93.63	97.65	97.54	93.87	25%	26%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	259.350.000	10.443.840	64.035.710	109.242.510	0	244.136.766	2.400.000	46.375.000	62.735.000	0	94.13	22.98	72.42	57.43	163%	590%

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	46.000.000	108.581.540	102.525.920	0	0	31.948.000	100.195.000	99.150.000	0	0	69.45	92.28	96.71	65%	106%

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang

c. Kinerja Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Genuk senantiasa menyelenggarakan pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, partisipasi, serta berorientasi pada hasil. Penyelenggaraan pelayanan tersebut berpedoman pada tiga bidang utama pembangunan, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan manusia, dan bidang kesejahteraan masyarakat.

1) Pengarusutamaan Gender dan Anggaran responsif Gender
   Kecamatan Genuk berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberi manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender diproyeksikan sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Implementasi Anggaran Responsif Gender juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.

2) Kota Layak Anak
   Sebagai bagian dari Kota Semarang, Kecamatan Genuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terhadap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA.

3) Penanggulangan Kemiskinan
   Kemiskinan masih menjadi tantangan di Kecamatan Genuk. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada strategi pemberdayaan masyarakat, penguatan akses permodalan, peningkatan keterampilan, serta optimalisasi program perlindungan sosial. Sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan stakeholder lainnya diperlukan agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

4) Percepatan Penurunan Stunting
   Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Kecamatan Genuk melaksanakan kegiatan koordinasi lintas sektor serta memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu dan PKK, mendukung penyuluhan gizi, serta menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam kegiatan kesehatan dan pola hidup bersih sehat.

5) Kecamatan Berdaya
Kecamatan Berdaya merupakan upaya membangun kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta partisipasi aktif warga dalam pembangunan.

6) Posyandu 6 Layanan SPM
Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah konsep yang mengintegrasikan enam bidang pelayanan yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketertiban Umum dan sosial. Kecamatan berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan pembina agar Posyandu 6 SPM berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.

7) Kerukunan Umat Beragama
Kerukunan antarumat beragama menjadi fondasi utama kehidupan sosial di Kecamatan Genuk. Pemerintah Kecamatan berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya budaya toleransi, saling menghormati, dan gotong royong dalam bingkai kebhinekaan.

8) Indeks Harmoni
Kecamatan Genuk berperan penting dalam mendukung Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Pada dimensi ekonomi, kecamatan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi UMKM, koperasi, serta akses bantuan sosial secara adil dan transparan. Pada dimensi sosial, kecamatan menguatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang, kegiatan gotong royong, serta mediasi konflik sosial di tingkat lokal.
Dalam dimensi budaya, kecamatan berkomitmen melestarikan kearifan lokal dan memperkuat toleransi antar komunitas melalui kegiatan seni, tradisi, dan budaya. Sementara pada dimensi keberagamaan, kecamatan memfasilitasi dialog antarumat beragama, mendukung kegiatan sosial-keagamaan, serta melakukan pengawasan partisipatif terhadap potensi intoleransi. Dengan demikian, kecamatan menjadi koordinator, fasilitator, dan mediator yang menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

d. Mitra Kecamatan Genuk dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah, Kecamatan Genuk Kota Semarang secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mitra Kecamatan Genuk terbagi dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

1. Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan
Sebagai mitra langsung di wilayah, kelurahan dan lembaga seperti RT/RW, LPMK, PKK, karang taruna, dan forum anak merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan di tingkat paling bawah. Mereka berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, mendukung pelaksanaan program pembangunan, dan menyampaikan informasi layanan secara cepat dan akurat.

2. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam)
   Kecamatan Genuk menjalin sinergi dengan instansi vertikal seperti Polsek, Koramil, dan KUA dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan pelayanan lintas sektor.
3. Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan
   Sekolah, puskesmas, rumah sakit, masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya menjadi mitra penting dalam pembinaan masyarakat, kampanye kesehatan, serta penguatan nilai-nilai sosial dan moral. Kerja sama dalam program edukasi, imunisasi, dan pemberdayaan remaja turut memperkuat peran kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
4. Pelaku Dunia Usaha dan UMKM
   Dunia usaha, koperasi, dan pelaku UMKM lokal menjadi mitra dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Kecamatan berperan dalam memfasilitasi pelatihan, promosi produk, pengurusan perizinan, serta mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung pembangunan wilayah.

Melalui kemitraan yang solid dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, Kecamatan Genuk mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan menyeluruh. Kemitraan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi dalam mewujudkan Kecamatan Genuk yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

e. Inovasi Kecamatan Genuk Kota Semarang

Terkait pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Gula Manis **(GenUk meLAyani dengan MudAh daN praktIS)**
   Merupakan program yang dapat mempersingkat tahapan-tahapan kepengurusan Surat Keterangan Waris melalui program “GULA MANIS” bertujuan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Mayarakat.
2. Si Genting
   Merupakan program "GENTING" (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang bertujuan mencegah stunting pada anak-anak dengan memberikan bantuan makanan bergizi.
3. Gerakan Gen B (Genuk Bersih)
   Merupakan salah satu bentuk inovasi untuk menciptakan wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang yang bersih dan sehat dengan mengadakan kegiatan kerja bhakti secara berkala untuk membersihkan lingkungan dan fasilitas umum serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan dan mempromosikan kampanye kebersihan.
4. Wanita Tani Gebangsari
   Merupakan Kelompok Wanita Tani yang Melakukan Urban Farming dengan membuat taman dan green house swadaya masyarakat yang ada di kelurahan Gebangsari. di taman tersebut banyak ditanami cabai, tomat, terong dan juga bawang sedangkan di green house tersebut ditanami selada, sawi, kangkung dan Buah Melon. Program ini lahir sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat.

f. Penghargaan

Pada Tahun 2023, Kecamatan Genuk melalui Kelurahan Gebangsari Meraih Juara III dalam Lomba Urban Farming Tingkat Kota Semarang.

2.1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Genuk dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Genuk sebagai berikut:

1. Belum optimalnya struktur dan kapasitas kelembagaan, yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar unit kerja.
2. Kualitas pelayanan publik yang belum konsisten, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat.
3. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses pelayanan dan monitoring belum sepenuhnya digital dan efisien.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, yang menyebabkan rendahnya dampak pembangunan berbasis komunitas.
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang mempengaruhi pelaksanaan program secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Genuk untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Dukungan kebijakan pemerintah kota dan nasional terhadap penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
2. Kemajuan teknologi digital, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi pengelolaan data.
3. Potensi kolaborasi lintas sektor, baik dengan OPD lain, lembaga masyarakat, maupun perguruan tinggi untuk inovasi pelayanan dan pemberdayaan.
4. Semangat reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja, yang mendorong perbaikan sistem dan budaya kerja.
5. Ketersediaan SDM yang berdedikasi dan terbuka terhadap pengembangan kapasitas, sebagai modal penting dalam transformasi pelayanan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GENUK

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Genuk Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang.

2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah **"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan"**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Genuk terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **"Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan"**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah **"Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan"**.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Genuk Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Genuk Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Genuk;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Genuk;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Genuk Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Genuk;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Genuk;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Genuk;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Genuk;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Genuk;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Genuk;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Genuk;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Genuk;

j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Genuk;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Genuk.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Genuk Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rumusan Permasalahan Kecamatan Genuk Kota Semarang
Tahun 2025 – 2029

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Genuk	belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Genuk
		belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Genuk
		belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Genuk
2	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Genuk	belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Genuk
		belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Genuk
		belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Genuk
		belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Genuk
		masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Genuk
3	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk
		belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Genuk
		belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk
		belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Genuk

2.2.2 TELAAHAN DOKUMEN LAINNYA

A. TELAAHAN RPJMN 2025 – 2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif.”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya

meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.**

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 **Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan.

Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.
Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Genuk mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif”** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.”**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat” (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Genuk mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat” (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran “Indeks Pelayanan Publik” (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran “meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu “Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah” (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Genuk mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Genuk dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

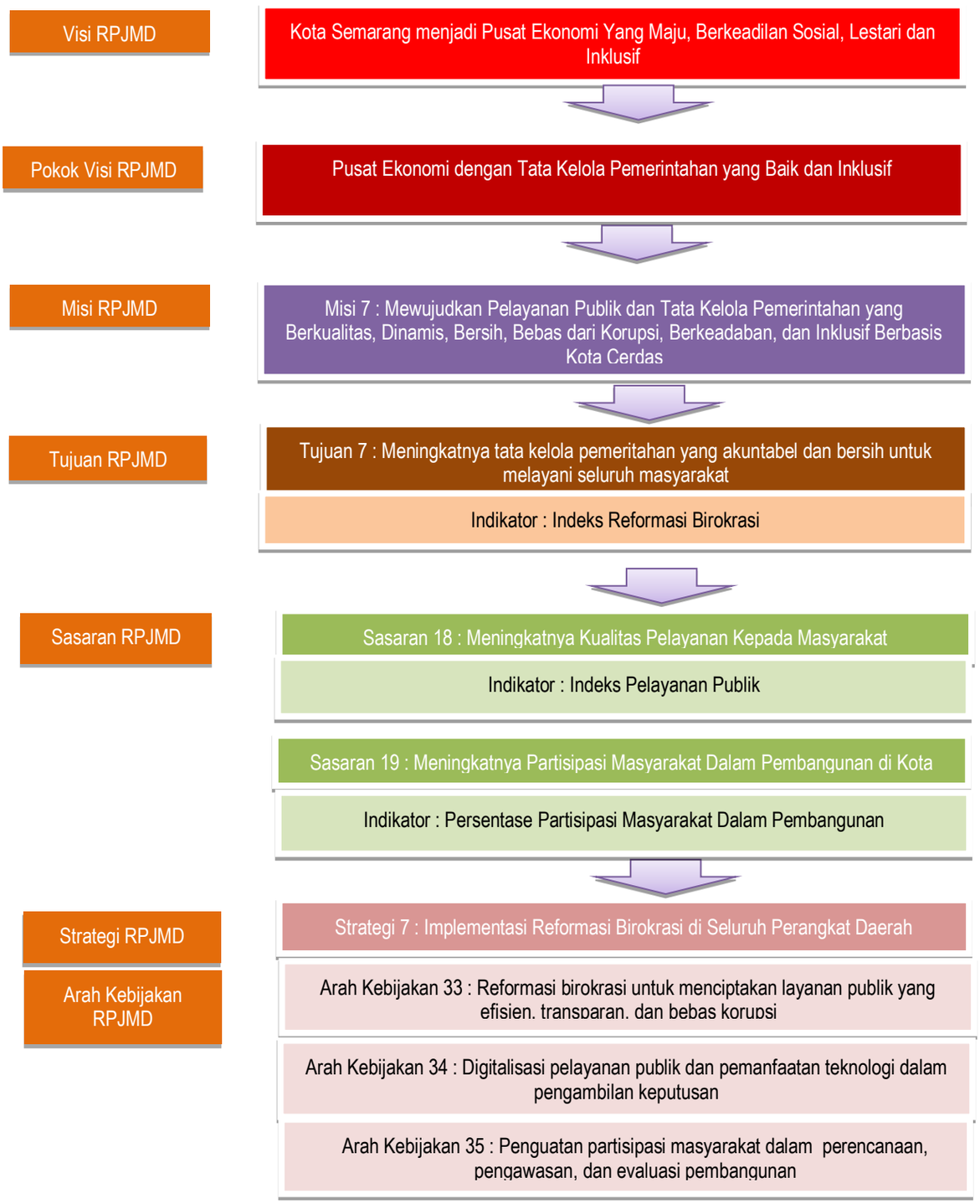

Gambar 2.4
Peranan Kecamatan Genuk dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Kecamatan Genuk tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, rencana struktur ruang meliputi:

1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)
   - Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
   - Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perkotaan Lainnya.

Dalam sistem pengembangan wilayah Kota, Kecamatan dikelompokkan dalam BWK yang meliputi:

a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa berskala internasional;
   - pusat pemerintahan Provinsi; dan
   - pusat pemerintahan Kota.

b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pusat pendidikan kepolisian; dan
   - pusat olahraga

c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - transportasi laut;
   - transportasi udara; dan
   - kantor pelayanan pemerintahan Provinsi

d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk; dengan rencana pengembangan fungsi utama berupa industri.
e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - jasa pertemuan dan pameran.
f. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang, dengan rencana pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi.
g. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perkantoran militer; dan
   - perdagangan dan jasa.
h. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pendidikan tinggi; dan
   - paru-paru Kota.
i. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
   - paru-paru Kota.
j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - industri.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Genuk Adalah BWK IV dengan luas kurang lebih 2.738 hektar, dengan rencana pengembangan fungsi utama berupa industri.
Sedangkan rencana penetapan pusat pelayanan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota, berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Genuk adalah Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Terboyo Wetan dan Kelurahan Trimulyo.
3. Pusat Lingkungan, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di Kecamatan Genuk yaitu:
   - Pusat Lingkungan 1 terdapat di Kelurahan Terboyo Wetan dengan daerah pelayanan Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kelurahan Gebangsari, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Bangetayu Kulon;
   - Pusat Lingkungan 2 terdapat di Kelurahan Banjardowo dengan daerah pelayanan Kelurahan Karangroto, Kelurahan Kudu, Kelurahan Kelurahan Sambungharjo, Kelurahan Bangetayu Wetan dan Kelurahan Penggaron Lor

E. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA SEMARANG

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (4) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan masalah strategis "**Belum optimalnya pelayanan public yang "transparan dan akuntabel**", dan isu strategis "**Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab**", seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Tema isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Genuk Kota Semarang

Pilar	Masalah Strategis	Isu Strategis
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

2.2.3 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk adalah isu strategis ke tujuh, yaitu “Penyelenggaraan Good Governance”. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu: “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Genuk, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Genuk, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RT RW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Isu Strategis Kecamatan Genuk
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Genuk	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelenggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Genuk
		belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Genuk						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk
		belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk						peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Genuk

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Genuk dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Genuk Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal "Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi"; "Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan"; "Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan".

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah "**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**", dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**.

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN GENUK

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Genuk Kota Semarang, yaitu :

1. **"Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Genuk"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).

2. **"Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Genuk"**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

3.2. SASARAN RENSTRA KECAMATAN GENUK

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Genuk Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang, dimana Kecamatan Genuk mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Genuk.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Genuk maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Genuk**

   Dengan indikator sasaran yaitu :

   1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Genuk**.

      Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.

   2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Genuk**

      Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Genuk**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Genuk**".

   Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Genuk terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Genuk**
   Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Genuk**".
   Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Genuk melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Genuk.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat											
	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Genuk	Angka	96,37	96,55	96,94	97,27	97,54	97,66	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Genuk	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Genuk	Angka	76,80	77,70	77,80	77,90	78,00	78,10	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Genuk	Angka	93,95	94,25	94,90	95,45	95,90	96,10	
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Genuk	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Genuk	Persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Genuk	Angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang											
		SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk	Angka	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Sumber: Kecamatan Genuk 2025

3.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN GENUK

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Genuk Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.3.1 STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Kecamatan Genuk Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Genuk	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Genuk	Memaksimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Genuk	Menguatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Genuk	Menyempurnakan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Genuk
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk	Penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk	Percepatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk	Percepatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk

Sumber: Kecamatan Genuk 2025

3.3.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Genuk Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 **Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Genuk**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Genuk;
(b) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Genuk;
(c) peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Genuk.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Genuk;

(b) peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
(c) peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Genuk;
(d) peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Genuk;
(e) peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Genuk;
(f) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Genuk.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :
(a) peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk;
(b) peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Genuk;
(c) peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk;
(d) peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Genuk.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Genuk Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Genuk	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Genuk	
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Genuk	
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Genuk	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Genuk	

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Genuk	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Genuk	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Genuk	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Genuk	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Genuk	

Sumber: Kecamatan Genuk 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Genuk	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Genuk	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Genuk
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Genuk
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Genuk
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Genuk	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Genuk
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Genuk
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Genuk
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Genuk
			6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Genuk
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Genuk
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Genuk
			3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Genuk

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN GENUK

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Genuk untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Genuk

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Genuk**		**Camat**
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		S1:Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Genuk			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Genuk		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Genuk yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Kecamatan
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk		Sekretaris Kecamatan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Genuk	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Genuk	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan Genuk			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Genuk		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Genuk yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Genuk	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sembungharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sembungharjo	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Sembungharjo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sembungharjo)	Sekretaris dan Staf Kel. Sembungharjo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kudu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kudu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kudu
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kudu	Sekretaris dan Staf Kel. Kudu

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangroto	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangroto	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Karangroto
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangroto)	Sekretaris dan Staf Kel. Karangroto
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Genuksari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Genuksari	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Genuksari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Genuksari)	Sekretaris dan Staf Kel. Genuksari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Banjardowo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Lurah Banjardowo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					yang Ada di Kelurahan Banjardowo	yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Banjardowo)	Sekretaris dan Staf Kel. Banjardowo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gebangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gebangsari	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Gebangsari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gebangsari)	Sekretaris dan Staf Kel. Gebangsari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Trimulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Trimulyo	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Lurah Trimulyo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Trimulyo)	Sekretaris dan Staf Kel. Trimulyo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Lor	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Lor
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Lor)	Sekretaris dan Staf Kel. Penggaron Lor
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Muktiharjo Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Muktiharjo Lor	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Muktiharjo Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Lor)	Sekretaris dan Staf Kel. Muktiharjo Lor
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bangetayu Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bangetayu Kulon	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bangetayu Kulon
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bangetayu Kulon)	Sekretaris dan Staf Kel. Bangetayu Kulon
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bangetayu Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bangetayu Wetan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bangetayu Wetan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kel. Bangetayu Wetan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						(Kelurahan Bangetayu Wetan)	
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Terboyo Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Terboyo Kulon	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Terboyo Kulon
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Terboyo Kulon)	Sekretaris dan Staf Kel. Terboyo Kulon
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Terboyo Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Terboyo Wetan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Terboyo Wetan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris dan Staf Kel. Terboyo Wetan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						(Kelurahan Terboyo Wetan)	
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Genuk	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pembangunan Kecamatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sembungharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sembungharjo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Sembungharjo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Sembungharjo)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Sembungharjo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kudu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kudu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kudu

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kudu)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Kel. Kudu
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangroto	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangroto	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Karangroto
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangroto)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Karangroto
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Genuksari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Genuksari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Genuksari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Genuksari)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Genuksari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Banjardowo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Banjardowo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Camat di Kelurahan Banjardowo		
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Banjardowo)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Banjardowo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gebangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gebangsari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Gebangsari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gebangsari)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Gebangsari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Trimulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Trimulyo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Trimulyo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Trimulyo)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Trimulyo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Penggaron Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Penggaron Lor	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Penggaron Lor
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Penggaron Lor)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Penggaron Lor
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Muktiharjo Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Muktiharjo Lor	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Muktiharjo Lor
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Muktiharjo Lor)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Muktiharjo Lor
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bangetayu Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bangetayu Kulon	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bangetayu Kulon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bangetayu Kulon)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Bangetayu Kulon
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bangetayu Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bangetayu Wetan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bangetayu Wetan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Bangetayu Wetan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Terboyo Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Terboyo Kulon	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Terboyo Kulon
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Terboyo Kulon)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Terboyo Kulon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Terboyo Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Terboyo Wetan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Terboyo Wetan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Terboyo Wetan)	Kasi Pembangunan/ Staf Kel. Terboyo Wetan
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Genuk		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Genuk	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan Genuk		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang		S3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		Camat
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Seksi Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sembungharjo	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Sembungharjo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sembungharjo)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Sembungharjo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kudu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kudu	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kudu
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kudu)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Kel. Kudu
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Karangroto	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangroto	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Karangroto
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangroto)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Karangroto
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Genuksari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Genuksari	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Genuksari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Genuksari)	Kasi Reksos/Staf Kel. Genuksari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Banjardowo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Banjardowo	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Banjardowo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banjardowo)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Banjardowo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Gebangsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gebangsari	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Gebangsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gebangsari)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Gebangsari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Trimulyo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Trimulyo	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Trimulyo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Trimulyo)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Kel. Trimulyo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Penggaron Lor	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Penggaron Lor
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Lor)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Penggaron Lor
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Muktiharjo Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muktiharjo Lor	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Muktiharjo Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Lor)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Muktiharjo Lor
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bangetayu Kulon	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bangetayu Kulon
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bangetayu Kulon)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Bangetayu Kulon
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Bangetayu Wetan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Bangetayu Wetan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bangetayu Wetan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Bangetayu Wetan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terboyo Kulon	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Terboyo Kulon
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Terboyo Kulon)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Terboyo Kulon
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terboyo Wetan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Terboyo Wetan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Terboyo Wetan)	Kasi Reksos/ Staf Kel. Terboyo Wetan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Genuk	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kecamatan Genuk	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi Pemerintahan Kecamatan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sembungharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Sembungharjo	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Sembungharjo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sembungharjo)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum /Staf Kel. Sembungharjo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kudu	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Kudu	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kudu

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kudu)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Kudu
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangroto	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Karangroto	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Karangroto
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangroto)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Karangroto
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Genuksari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Genuksari	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Genuksari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Genuksari)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Genuksari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Banjardowo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Banjardowo	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Banjardowo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Banjardowo)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Banjardowo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gebangsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Gebangsari	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Gebangsari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gebangsari)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Gebangsari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Trimulyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Trimulyo	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Trimulyo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Trimulyo)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Trimulyo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Penggaron Lor	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Penggaron Lor
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Penggaron Lor)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Penggaron Lor
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Muktiharjo Lor	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Muktiharjo Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Muktiharjo Lor)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Muktiharjo Lor
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Bangetayu Kulon	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bangetayu Kulon
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bangetayu Kulon)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Bangetayu Kulon
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Bangetayu Wetan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bangetayu Wetan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Bangetayu Wetan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Terboyo Kulon	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Terboyo Kulon
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Terboyo Kulon)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Terboyo Kulon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Terboyo Wetan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Terboyo Wetan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Terboyo Wetan)	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum/Staf Kel. Terboyo Wetan
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Sumber : Kecamatan Genuk Tahun 2025

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan**	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk**		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	**Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan**	**Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	**Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)**	**Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Genuk**		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	**Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil**			
7.	**Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi**			
8.	**Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK**			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Genuk dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Genuk Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01 KECAMATAN				**64.429.862.988**		**69.108.428.451**		**71.144.757.913**		**71.518.802.700**		**72.401.096.889**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**21.535.471.044**		**23.976.248.299**		**25.038.588.171**		**25.233.724.910**		**25.694.012.066**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Genuk yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**21.535.471.044**	**100%**	**23.976.248.299**	**100%**	**25.038.588.171**	**100%**	**25.233.724.910**	**100%**	**25.694.012.066**	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.793.636		50.422.951		62.971.886		69.882.101		76.196.305	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	43.793.636	100%	50.422.951	100%	62.971.886	100%	69.882.101	100%	76.196.305	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.856.836		17.666.815		20.805.175		25.034.675		30.572.295	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	15.856.836	4 Dokumen	17.666.815	4 Dokumen	20.805.175	6 Dokumen	25.034.675	4 Dokumen	30.572.295	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.998.000		6.998.000		8.219.294		9.290.284		9.456.579	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.998.000	1 Dokumen	6.998.000	1 Dokumen	8.219.294	1 Dokumen	9.290.284	1 Dokumen	9.456.579	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.998.000		6.998.000		8.219.294		9.325.130		9.492.050	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.998.000	1 Dokumen	6.998.000	1 Dokumen	8.219.294	1 Dokumen	9.325.130	1 Dokumen	9.492.050	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.118.000		3.118.000		6.118.000		6.318.000		6.418.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.118.000	1 Dokumen	3.118.000	1 Dokumen	6.118.000	1 Dokumen	6.318.000	1 Dokumen	6.418.000	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.118.000		3.118.000		6.118.000		6.318.000		6.418.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.118.000	1 Dokumen	3.118.000	1 Dokumen	6.118.000	1 Dokumen	6.318.000	1 Dokumen	6.418.000	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.704.800		1.824.136		1.965.123		1.980.254		2.015.701	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	5 Laporan	1.704.800	5 Laporan	1.824.136	5 Laporan	1.965.123	5 Laporan	1.980.254	5 Laporan	2.015.701	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.700.000		11.527.000		11.615.758		11.823.680	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.700.000	1 Dokumen	11.527.000	1 Dokumen	11.615.758	1 Dokumen	11.823.680	Kecamatan Genuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
	Pendukung Statistik Sektoral Daerah												
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.743.085.761		21.125.101.764		21.736.734.654		21.805.631.113		22.129.561.472	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	19.743.085.761	100%	21.125.101.764	100%	21.736.734.654	100%	21.805.631.113	100%	22.129.561.472	
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.143.392.141		20.483.429.591		21.059.731.355		21.100.875.887		21.403.331.928	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	120 Orang	19.143.392.141	120 Orang	20.483.429.591	120 Orang	21.059.731.355	120 Orang	21.100.875.887	120 Orang	21.403.331.928	Kecamatan Genuk
7.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				595.793.820		637.499.387		672.508.000		700.225.312		721.618.545	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	595.793.820	12 dokumen	637.499.387	12 dokumen	672.508.000	12 dokumen	700.225.312	12 dokumen	721.618.545	Kecamatan Genuk
7.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.192.400		3.415.868		3.679.879		3.708.215		3.774.592	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 laporan	1 laporan	3.192.400	1 laporan	3.415.868	1 laporan	3.679.879	1 laporan	3.708.215	1 laporan	3.774.592	Kecamatan Genuk
7.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				112.400		120.268		129.563		130.561		132.898	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12 laporan	12 laporan	112.400	12 laporan	120.268	12 laporan	129.563	12 laporan	130.561	12 laporan	132.898	Kecamatan Genuk
7.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				595.000		636.650		685.857		691.138		703.509	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	595.000	1 dokumen	636.650	1 dokumen	685.857	1 dokumen	691.138	1 dokumen	703.509	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				33.600.000		37.600.000		52.521.220		59.452.583		60.963.085	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Genuk	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Genuk	N/A	89 Angka	33.600.000	91 Angka	37.600.000	92 Angka	52.521.220	93 Angka	59.452.583	94 Angka	60.963.085	
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.000.000		3.100.000		3.300.000		3.400.000		3.500.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	N/A	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	3.100.000	4 dokumen	3.300.000	4 dokumen	3.400.000	4 dokumen	3.500.000	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30.600.000		34.500.000		49.221.220		56.052.583		57.463.085	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	350 orang	30.600.000	350 orang	34.500.000	350 orang	49.221.220	350 orang	56.052.583	350 orang	57.463.085	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				189.323.000		252.675.500		302.289.111		308.561.837		314.543.295	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan	100%	100%	189.323.000	100%	252.675.500	100%	302.289.111	100%	308.561.837	100%	314.543.295	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	sarpras kantor Kecamatan Genuk												
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		32.100.000		33.581.000		34.847.274		35.471.040	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35 paket	12 paket	30.000.000	12 paket	32.100.000	12 paket	33.581.000	12 paket	34.847.274	12 paket	35.471.040	Kecamatan Genuk
7.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.823.000		9.823.000		13.709.061		13.814.621		14.061.903	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 paket	12 paket	7.823.000	12 paket	9.823.000	12 paket	13.709.061	12 paket	13.814.621	12 paket	14.061.903	Kecamatan Genuk
7.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.750.000		40.750.000		46.972.525		47.334.213		48.181.496	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 laporan	12 laporan	30.750.000	12 laporan	40.750.000	12 laporan	46.972.525	12 laporan	47.334.213	12 paket	48.181.496	Kecamatan Genuk
7.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.750.000		65.002.500		70.026.525		70.565.729		71.828.856	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 laporan	12 laporan	50.750.000	12 laporan	65.002.500	12 laporan	70.026.525	12 laporan	70.565.729	12 paket	71.828.856	Kecamatan Genuk
7.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				70.000.000		105.000.000		138.000.000		142.000.000		145.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	105.000.000	4 Dokumen	138.000.000	4 Dokumen	142.000.000	4 Dokumen	145.000.000	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000		300.000.000		420.000.000		453.927.000		523.126.293	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	100%	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	420.000.000	100%	453.927.000	100%	523.126.293	
7.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		300.000.000		420.000.000		453.927.000		523.126.293	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 unit	5 unit	200.000.000	5 unit	300.000.000	5 unit	420.000.000	5 unit	453.927.000	5 unit	523.126.293	Kecamatan Genuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				899.031.712		1.386.950.037		1.525.212.115		1.539.212.115		1.583.212.115	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	899.031.712	100%	1.386.950.037	100%	1.525.212.115	100%	1.539.212.115	100%	1.583.212.115	
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				184.547.500		197.465.825		235.727.903		238.727.903		258.727.903	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	12 laporan	184.547.500	12 laporan	197.465.825	12 laporan	235.727.903	12 laporan	238.727.903	12 laporan	258.727.903	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				714.484.212		1.189.484.212		1.289.484.212		1.300.484.212		1.324.484.212	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	N/A	12 laporan	714.484.212	12 laporan	1.189.484.212	12 laporan	1.289.484.212	12 laporan	1.300.484.212	12 laporan	1.324.484.212	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				426.636.935		823.498.047		938.859.185		997.058.161		1.006.409.501	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Pemerintahan Daerah													
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk sesuai ketentuan	100%	100%	426.636.935	100%	823.498.047	100%	938.859.185	100%	997.058.161	100%	1.006.409.501	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				190.498.850		235.053.770		266.498.850		268.550.891		273.357.952	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	47 Unit	45 Unit	190.498.850	45 Unit	235.053.770	45 Unit	266.498.850	45 Unit	268.550.891	45 Unit	273.357.952	Kecamatan Genuk
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.138.085		87.652.351		97.426.977		107.493.674		108.493.674	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	50 Unit	36.138.085	50 Unit	87.652.351	50 Unit	97.426.977	50 Unit	107.493.674	50 Unit	108.493.674	Kecamatan Genuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		500.791.926		574.933.358		621.013.596		624.557.875	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	500.791.926	2 Unit	574.933.358	2 Unit	621.013.596	2 Unit	624.557.875	Kecamatan Genuk
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.531.229.589		5.010.613.855		5.219.264.202		5.257.590.306		5.347.993.648	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Genuk yang tepat waktu	100%	100%	4.531.229.589	100%	5.010.613.855	100%	5.219.264.202	100%	5.257.590.306	100%	5.347.993.648	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.250.263.440		1.408.613.095		1.439.053.219		1.452.133.932		1.469.683.803	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	100%	7.820.960	100%	8.368.426	100%	9.001.925	100%	9.071.243	100%	9.233.615	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7.820.960		8.368.426		9.001.925		9.071.243		9.233.615	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	7.820.960	1 Laporan	8.368.426	1 Laporan	9.001.925	1 Laporan	9.071.243	1 Laporan	9.233.615	Kecamatan Genuk
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	1.242.442.480	100%	1.400.244.669	100%	1.430.051.294	100%	1.443.062.689	100%	1.460.450.188	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.242.442.480		1.400.244.669		1.430.051.294		1.443.062.689		1.460.450.188	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	1 Dokumen	1.242.442.480	1 Dokumen	1.400.244.669	1 Dokumen	1.430.051.294	1 Dokumen	1.443.062.689	1 Dokumen	1.460.450.188	Kecamatan Genuk
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah				2.451.477.396		2.713.080.814		2.833.136.107		2.850.951.254		2.906.054.882	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
yang ada di Kecamatan													
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Genuk	100%	100%	937.477.396	100%	1.093.100.814	100%	1.105.662.107	100%	1.110.175.705	100%	1.134.119.450	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				937.477.396		1.093.100.814		1.105.662.107		1.110.175.705		1.134.119.450	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	937.477.396	12 Laporan	1.093.100.814	12 Laporan	1.105.662.107	12 Laporan	1.110.175.705	12 Laporan	1.134.119.450	Kecamatan Genuk
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sembungharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sembungharjo	100%	100%	121.000.000	100%	129.470.000	100%	138.061.000	100%	139.124.070	100%	141.614.391	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				121.000.000		129.470.000		138.061.000		139.124.070		141.614.391	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	121.000.000	12 Laporan	129.470.000	12 Laporan	138.061.000	12 Laporan	139.124.070	12 Laporan	141.614.391	Kel. Sembungharjo
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kudu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kudu	100%	100%	119.000.000	100%	127.330.000	100%	135.779.000	100%	136.824.498	100%	139.273.657	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				119.000.000		127.330.000		135.779.000		136.824.498		139.273.657	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	119.000.000	12 Laporan	127.330.000	12 Laporan	135.779.000	12 Laporan	136.824.498	12 Laporan	139.273.657	Kel. Kudu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangroto	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangroto	100%	100%	127.000.000	100%	135.890.000	100%	144.907.000	100%	146.022.784	100%	148.636.592	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				127.000.000		135.890.000		144.907.000		146.022.784		148.636.592	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	127.000.000	12 Laporan	135.890.000	12 Laporan	144.907.000	12 Laporan	146.022.784	12 Laporan	148.636.592	Kel. Karangroto
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Genuksari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Genuksari	100%	100%	122.000.000	100%	130.540.000	100%	139.202.000	100%	140.273.855	100%	142.784.757	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				122.000.000		130.540.000		139.202.000		140.273.855		142.784.757	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	122.000.000	12 Laporan	130.540.000	12 Laporan	139.202.000	12 Laporan	140.273.855	12 Laporan	142.784.757	Kel. Genuksari
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Banjardowo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Banjardowo	100%	100%	119.000.000	100%	127.330.000	100%	135.779.000	100%	136.824.498	100%	139.273.657	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				119.000.000		127.330.000		135.779.000		136.824.498		139.273.657	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	119.000.000	12 Laporan	127.330.000	12 Laporan	135.779.000	12 Laporan	136.824.498	12 Laporan	139.273.657	Kel. Banjardowo
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gebangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gebangsari	100%	100%	119.000.000	100%	127.330.000	100%	135.779.000	100%	136.824.498	100%	139.273.657	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				119.000.000		127.330.000		135.779.000		136.824.498		139.273.657	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	119.000.000	12 Laporan	127.330.000	12 Laporan	135.779.000	12 Laporan	136.824.498	12 Laporan	139.273.657	Kel. Gebangsari
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Trimulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Trimulyo	100%	100%	93.000.000	100%	99.510.000	100%	106.113.000	100%	106.930.070	100%	108.844.118	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				93.000.000		99.510.000		106.113.000		106.930.070		108.844.118	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	12 Laporan	99.510.000	12 Laporan	106.113.000	12 Laporan	106.930.070	12 Laporan	108.844.118	Kel. Trimulyo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Lor	100%	100%	115.000.000	100%	123.050.000	100%	131.215.000	100%	132.225.356	100%	134.592.189	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				115.000.000		123.050.000		131.215.000		132.225.356		134.592.189	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	115.000.000	12 Laporan	123.050.000	12 Laporan	131.215.000	12 Laporan	132.225.356	12 Laporan	134.592.189	Kel. Penggaron Lor
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Muktiharjo Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Muktiharjo Lor	100%	100%	113.000.000	100%	120.910.000	100%	128.933.000	100%	129.925.784	100%	132.251.456	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				113.000.000		120.910.000		128.933.000		129.925.784		132.251.456	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	113.000.000	12 Laporan	120.910.000	12 Laporan	128.933.000	12 Laporan	129.925.784	12 Laporan	132.251.456	Kelurahan Muktiharjo Lor
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bangetayu Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bangetayu Kulon	100%	100%	124.000.000	100%	132.680.000	100%	141.484.000	100%	142.573.427	100%	145.125.491	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				124.000.000		132.680.000		141.484.000		142.573.427		145.125.491	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	124.000.000	12 Laporan	132.680.000	12 Laporan	141.484.000	12 Laporan	142.573.427	12 Laporan	145.125.491	Kelurahan Bangetayu Kulon
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bangetayu Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bangetayu Wetan	100%	100%	122.000.000	100%	130.540.000	100%	139.202.000	100%	140.273.855	100%	142.784.757	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				122.000.000		130.540.000		139.202.000		140.273.855		142.784.757	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	122.000.000	12 Laporan	130.540.000	12 Laporan	139.202.000	12 Laporan	140.273.855	12 Laporan	142.784.757	Kelurahan Bangetayu Wetan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Terboyo Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Terboyo Kulon	100%	100%	110.000.000	100%	117.700.000	100%	125.510.000	100%	126.476.427	100%	128.740.355	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.000.000		117.700.000		125.510.000		126.476.427		128.740.355	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	117.700.000	12 Laporan	125.510.000	12 Laporan	126.476.427	12 Laporan	128.740.355	Kelurahan Terboyo Kulon

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Terboyo Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Terboyo Wetan	100%	100%	110.000.000	100%	117.700.000	100%	125.510.000	100%	126.476.427	100%	128.740.355	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.000.000		117.700.000		125.510.000		126.476.427		128.740.355	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	117.700.000	12 Laporan	125.510.000	12 Laporan	126.476.427	12 Laporan	128.740.355	Kelurahan Terboyo Wetan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				829.488.753		888.919.946		947.074.876		954.505.120		972.254.963	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Genuk	100%	100%	356.029.420	100%	378.822.986	100%	406.857.777	100%	409.990.582	100%	417.329.414	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				356.029.420		378.822.986		406.857.777		409.990.582		417.329.414	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	356.029.420	12 Laporan	378.822.986	12 Laporan	406.857.777	12 Laporan	409.990.582	12 Laporan	417.329.414	Kecamatan Genuk
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sembungharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sembungharjo	100%	100%	38.739.000	100%	41.838.120	100%	44.201.199	100%	44.541.548	100%	45.338.842	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				38.739.000		41.838.120		44.201.199		44.541.548		45.338.842	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	38.739.000	12 Laporan	41.838.120	12 Laporan	44.201.199	12 Laporan	44.541.548	12 Laporan	45.338.842	Kel. Sembungharjo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kudu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kudu	100%	100%	38.274.000	100%	41.335.920	100%	43.670.634	100%	44.006.898	100%	44.794.621	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				38.274.000		41.335.920		43.670.634		44.006.898		44.794.621	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	38.274.000	12 Laporan	41.335.920	12 Laporan	43.670.634	12 Laporan	44.006.898	12 Laporan	44.794.621	Kel. Kudu
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangroto	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangroto	100%	100%	38.824.000	100%	41.929.920	100%	44.298.184	100%	44.639.280	100%	45.438.323	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				38.824.000		41.929.920		44.298.184		44.639.280		45.438.323	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	38.824.000	12 Laporan	41.929.920	12 Laporan	44.298.184	12 Laporan	44.639.280	12 Laporan	45.438.323	Kel. Karangroto
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Genuksari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Genuksari	100%	100%	39.504.000	100%	42.664.320	100%	45.074.064	100%	45.421.134	100%	46.234.173	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				39.504.000		42.664.320		45.074.064		45.421.134		46.234.173	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	39.504.000	12 Laporan	42.664.320	12 Laporan	45.074.064	12 Laporan	45.421.134	12 Laporan	46.234.173	Kel. Genuksari
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Banjardowo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Banjardowo	100%	100%	38.379.000	100%	41.449.320	100%	43.790.439	100%	44.127.625	100%	44.917.510	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				38.379.000		41.449.320		43.790.439		44.127.625		44.917.510	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	38.379.000	12 Laporan	41.449.320	12 Laporan	43.790.439	12 Laporan	44.127.625	12 Laporan	44.917.510	Kel. Banjardowo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gebangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gebangsari	100%	100%	36.664.000	100%	39.597.120	100%	41.833.624	100%	42.155.743	100%	42.910.331	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				36.664.000		39.597.120		41.833.624		42.155.743		42.910.331	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	36.664.000	12 Laporan	39.597.120	12 Laporan	41.833.624	12 Laporan	42.155.743	12 Laporan	42.910.331	Kel. Gebangsari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Trimulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Trimulyo	100%	100%	35.109.000	100%	37.917.720	100%	40.059.369	100%	40.367.826	100%	41.090.410	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.109.000		37.917.720		40.059.369		40.367.826		41.090.410	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	35.109.000	12 Laporan	37.917.720	12 Laporan	40.059.369	12 Laporan	40.367.826	12 Laporan	41.090.410	Kel. Trimulyo
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Penggaron Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Penggaron Lor	100%	100%	36.369.000	100%	39.278.520	100%	41.497.029	100%	41.816.556	100%	42.565.072	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				36.369.000		39.278.520		41.497.029		41.816.556		42.565.072	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	36.369.000	12 Laporan	39.278.520	12 Laporan	41.497.029	12 Laporan	41.816.556	12 Laporan	42.565.072	Kel. Penggaron Lor
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Muktiharjo Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Muktiharjo Lor	100%	100%	35.574.000	100%	38.419.920	100%	40.589.934	100%	40.902.476	100%	41.634.631	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.574.000		38.419.920		40.589.934		40.902.476		41.634.631	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	35.574.000	12 Laporan	38.419.920	12 Laporan	40.589.934	12 Laporan	40.902.476	12 Laporan	41.634.631	Kel. Muktiharjo Lor
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bangetayu Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bangetayu Kulon	100%	100%	38.939.000	100%	40.815.000	100%	44.429.399	100%	44.771.505	100%	45.572.915	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan				38.939.000		40.815.000		44.429.399		44.771.505		45.572.915	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	38.939.000	12 Laporan	40.815.000	12 Laporan	44.429.399	12 Laporan	44.771.505	12 Laporan	45.572.915	Kel. Bangetayu Kulon
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bangetayu Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bangetayu Wetan	100,00%	100,00%	38.754.000	100,00%	41.854.320	100,00%	44.218.314	100,00%	44.558.795	100,00%	45.356.397	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				38.754.000		41.854.320		44.218.314		44.558.795		45.356.397	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	38.754.000	12 Laporan	41.854.320	12 Laporan	44.218.314	12 Laporan	44.558.795	12 Laporan	45.356.397	Kel. Bangetayu Wetan
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Terboyo Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Terboyo Kulon	100%	100%	28.999.000	100%	31.318.920	100%	33.087.859	100%	33.480.405	100%	34.443.904	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				28.999.000		31.318.920		33.087.859		33.480.405		34.443.904	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	28.999.000	12 Laporan	31.318.920	12 Laporan	33.087.859	12 Laporan	33.480.405	12 Laporan	34.443.904	Kel. Terboyo Kulon
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Terboyo Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Terboyo Wetan	100%	100%	29.331.333	100%	31.677.840	100%	33.467.051	100%	33.724.747	100%	34.628.420	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				29.331.333		31.677.840		33.467.051		33.724.747		34.628.420	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	29.331.333	12 Laporan	31.677.840	12 Laporan	33.467.051	12 Laporan	33.724.747	12 Laporan	34.628.420	Kel. Terboyo Wetan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				109.933.183		121.563.633		126.625.746		127.555.584		129.748.880	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Genuk	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Genuk	100%	100%	109.933.183	100%	121.563.633	100%	126.625.746	100%	127.555.584	100%	129.748.880	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				109.933.183		121.563.633		126.625.746		127.555.584		129.748.880	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	12 Kegiatan	109.933.183	12 Kegiatan	121.563.633	12 Kegiatan	126.625.746	12 Kegiatan	127.555.584	12 Kegiatan	129.748.880	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				109.933.183		121.563.633		126.625.746		127.555.584		129.748.880	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	109.933.183	12 Laporan	121.563.633	12 Laporan	126.625.746	12 Laporan	127.555.584	12 Laporan	129.748.880	Kecamatan Genuk
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				103.607.952		114.569.220		119.340.074		120.216.412		122.283.512	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Genuk	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk	80%	82%	103.607.952	84%	114.569.220	86%	119.340.074	88%	120.216.412	90%	122.283.512	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				103.607.952		114.569.220		119.340.074		120.216.412		122.283.512	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	103.607.952	3 Kegiatan	114.569.220	3 Kegiatan	119.340.074	3 Kegiatan	120.216.412	3 Kegiatan	122.283.512	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				103.607.952		114.569.220		119.340.074		120.216.412		122.283.512	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	150 Orang	103.607.952	150 Orang	114.569.220	150 Orang	119.340.074	150 Orang	120.216.412	150 Orang	122.283.512	Kecamatan Genuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				38.149.621.220		39.885.433.444		40.640.939.720		40.779.715.488		41.107.058.783	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100%	100%	38.149.621.220	100%	39.885.433.444	100%	40.640.939.720	100%	40.779.715.488	100%	41.107.058.783	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				977.011.000		1.379.221.030		1.578.039.433		1.666.450.622		1.866.371.954	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	1 Laporan	1 Laporan	25.009.000	1 Laporan	34.011.700	1 Laporan	48.675.132	1 Laporan	58.942.624	1 Laporan	79.179.375	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.009.000		34.011.700		48.675.132		58.942.624		79.179.375	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.009.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	34.011.700	6 Lembaga Kemasyarakatan	48.675.132	6 Lembaga Kemasyarakatan	58.942.624	6 Lembaga Kemasyarakatan	79.179.375	Kecamatan Genuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	168.283.000	19 Kegiatan	411.220.000	19 Kegiatan	473.776.571	19 Kegiatan	488.199.128	19 Kegiatan	605.215.263	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				168.283.000		411.220.000		473.776.571		488.199.128		605.215.263	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	168.283.000	4 Pokmas/ Ormas	411.220.000	4 Pokmas/ Ormas	473.776.571	4 Pokmas/ Ormas	488.199.128	4 Pokmas /Ormas	605.215.263	Kecamatan Genuk
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sembungharjo	10 Kegiatan	10 Kegiatan	63.000.000	10 Kegiatan	77.410.000	10 Kegiatan	88.521.500	10 Kegiatan	92.948.005	10 Kegiatan	98.754.365	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				63.000.000		77.410.000		88.521.500		92.948.005		98.754.365	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	63.000.000	6 Pokmas/ Ormas	77.410.000	6 Pokmas/ Ormas	88.521.500	6 Pokmas/ Ormas	92.948.005	6 Pokmas /Ormas	98.754.365	Kel. Sembungharjo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kudu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kudu	10 Kegiatan	10 Kegiatan	57.800.000	10 Kegiatan	71.846.000	10 Kegiatan	81.122.900	10 Kegiatan	86.101.503	10 Kegiatan	91.428.608	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				57.800.000		71.846.000		81.122.900		86.101.503		91.428.608	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	57.800.000	6 Pokmas/ Ormas	71.846.000	6 Pokmas/ Ormas	81.122.900	6 Pokmas/ Ormas	86.101.503	6 Pokmas /Ormas	91.428.608	Kel. Kudu
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Karangroto	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangroto	12 Kegiatan	12 Kegiatan	73.000.000	12 Kegiatan	88.110.000	12 Kegiatan	99.826.500	12 Kegiatan	106.114.355	12 Kegiatan	112.842.359	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				73.000.000		88.110.000		99.826.500		106.114.355		112.842.359	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	73.000.000	6 Pokmas/ Ormas	88.110.000	6 Pokmas/ Ormas	99.826.500	6 Pokmas/ Ormas	106.114.355	6 Pokmas /Ormas	112.842.359	Kel. Karangroto
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Genuksari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Genuksari	10 Kegiatan	10 Kegiatan	65.880.000	10 Kegiatan	80.491.600	10 Kegiatan	91.065.340	10 Kegiatan	96.739.913	10 Kegiatan	102.811.708	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				65.880.000		80.491.600		91.065.340		96.739.913		102.811.708	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	65.880.000	6 Pokmas/ Ormas	80.491.600	6 Pokmas/ Ormas	91.065.340	6 Pokmas/ Ormas	96.739.913	6 Pokmas /Ormas	102.811.708	Kel. Genuksari
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Banjardowo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Banjardowo	10 Kegiatan	10 Kegiatan	65.040.000	10 Kegiatan	79.592.800	10 Kegiatan	90.031.720	10 Kegiatan	95.633.940	10 Kegiatan	101.628.316	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				65.040.000		79.592.800		90.031.720		95.633.940		101.628.316	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	65.040.000	6 Pokmas/ Ormas	79.592.800	6 Pokmas/ Ormas	90.031.720	6 Pokmas/ Ormas	95.633.940	6 Pokmas /Ormas	101.628.316	Kel. Banjardowo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gebangsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gebangsari	10 Kegiatan	10 Kegiatan	58.200.000	10 Kegiatan	70.134.000	10 Kegiatan	79.154.100	10 Kegiatan	83.994.887	10 Kegiatan	89.174.529	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				58.200.000		70.134.000		79.154.100		83.994.887		89.174.529	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	58.200.000	6 Pokmas/ Ormas	70.134.000	6 Pokmas/ Ormas	79.154.100	6 Pokmas/ Ormas	83.994.887	6 Pokmas /Ormas	89.174.529	Kel. Gebangsari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Trimulyo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Trimulyo	10 Kegiatan	10 Kegiatan	54.800.000	10 Kegiatan	56.866.000	10 Kegiatan	63.895.900	10 Kegiatan	67.668.613	10 Kegiatan	71.705.416	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				54.800.000		56.866.000		63.895.900		67.668.613		71.705.416	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	54.800.000	6 Pokmas/ Ormas	56.866.000	6 Pokmas/ Ormas	63.895.900	6 Pokmas/ Ormas	67.668.613	6 Pokmas /Ormas	71.705.416	Kel. Trimulyo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Penggaron Lor	9 Kegiatan	9 Kegiatan	51.400.000	9 Kegiatan	62.858.000	9 Kegiatan	70.786.700	9 Kegiatan	75.041.769	9 Kegiatan	79.594.693	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				51.400.000		62.858.000		70.786.700		75.041.769		79.594.693	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	51.400.000	6 Pokmas/ Ormas	62.858.000	6 Pokmas/ Ormas	70.786.700	6 Pokmas/ Ormas	75.041.769	6 Pokmas /Ormas	79.594.693	Kel. Penggaron Lor
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muktiharjo Lor	10 Kegiatan	10 Kegiatan	52.000.000	10 Kegiatan	63.150.000	10 Kegiatan	71.122.500	10 Kegiatan	75.401.075	10 Kegiatan	73.395.975	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				52.000.000		63.150.000		71.122.500		75.401.075		73.395.975	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	52.000.000	6 Pokmas/ Ormas	63.150.000	6 Pokmas/ Ormas	71.122.500	6 Pokmas/ Ormas	75.401.075	6 Pokmas /Ormas	73.395.975	Kel. Muktiharjo Lor
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bangetayu Kulon	12 Kegiatan	12 Kegiatan	75.695.000	12 Kegiatan	90.993.650	12 Kegiatan	103.142.698	12 Kegiatan	109.662.686	12 Kegiatan	116.639.074	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				75.695.000		90.993.650		103.142.698		109.662.686		116.639.074	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	75.695.000	6 Pokmas/ Ormas	90.993.650	6 Pokmas/ Ormas	103.142.698	6 Pokmas/ Ormas	109.662.686	6 Pokmas /Ormas	116.639.074	Kel. Bangetayu Kulon
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bangetayu Wetan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	65.600.000	12 Kegiatan	80.192.000	12 Kegiatan	90.720.800	12 Kegiatan	96.371.256	12 Kegiatan	102.417.245	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				65.600.000		80.192.000		90.720.800		96.371.256		102.417.245	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	65.600.000	6 Pokmas/ Ormas	80.192.000	6 Pokmas/ Ormas	90.720.800	6 Pokmas/ Ormas	96.371.256	6 Pokmas /Ormas	102.417.245	Kel. Bangetayu Wetan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terboyo Kulon	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50.400.000	12 Kegiatan	55.368.000	12 Kegiatan	62.173.200	12 Kegiatan	65.825.324	12 Kegiatan	69.733.097	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.400.000		55.368.000		62.173.200		65.825.324		69.733.097	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	50.400.000	6 Pokmas/ Ormas	55.368.000	6 Pokmas/ Ormas	62.173.200	6 Pokmas/ Ormas	65.825.324	6 Pokmas /Ormas	69.733.097	Kel. Terboyo Kulon
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terboyo Wetan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50.904.000	12 Kegiatan	56.977.280	12 Kegiatan	64.023.872	12 Kegiatan	67.805.544	12 Kegiatan	71.851.931	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.904.000		56.977.280		64.023.872		67.805.544		71.851.931	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	50.904.000	6 Pokmas/ Ormas	56.977.280	6 Pokmas/ Ormas	64.023.872	6 Pokmas/ Ormas	67.805.544	6 Pokmas /Ormas	71.851.931	Kel. Terboyo Wetan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				37.172.610.220		38.506.212.414		39.062.900.287		39.113.264.866		39.240.686.829	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Genuk	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Genuk	3 Laporan	4 Laporan	146.000.000	4 Laporan	160.600.000	4 Laporan	167.600.000	4 Laporan	174.957.200	4 Laporan	177.364.858	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				146.000.000		160.600.000		167.600.000		174.957.200		177.364.858	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga	4 Lembaga	146.000.000	4 Lembaga	160.600.000	4 Lembaga	167.600.000	4 Lembaga	174.957.200	4 Lembaga	177.364.858	Kecamatan Genuk
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Sembungharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sembungharjo	11 Laporan	6 Laporan	3.487.880.000	6 Laporan	3.609.955.800	6 Laporan	3.656.885.225	6 Laporan	3.660.542.111	6 Laporan	3.669.693.466	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.487.880.000		3.609.955.800		3.656.885.225		3.660.542.111		3.669.693.466	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	3.487.880.000	6 Lembaga	3.609.955.800	6 Lembaga	3.656.885.225	6 Lembaga	3.660.542.111	6 Lembaga	3.669.693.466	Kel. Sembungharjo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Kudu	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kudu	11 Laporan	6 Laporan	3.290.080.000	6 Laporan	3.405.232.800	6 Laporan	3.449.500.826	6 Laporan	3.452.950.327	6 Laporan	3.461.582.703	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.290.080.000		3.405.232.800		3.449.500.826		3.452.950.327		3.461.582.703	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	3.290.080.000	6 Lembaga	3.405.232.800	6 Lembaga	3.449.500.826	6 Lembaga	3.452.950.327	6 Lembaga	3.461.582.703	Kel. Kudu
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Karangroto	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangroto	11 Laporan	6 Laporan	5.528.000.000	6 Laporan	5.721.480.000	6 Laporan	5.795.859.240	6 Laporan	5.801.655.099	6 Laporan	5.816.159.237	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.528.000.000		5.721.480.000		5.795.859.240		5.801.655.099		5.816.159.237	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	5.528.000.000	6 Lembaga	5.721.480.000	6 Lembaga	5.795.859.240	6 Lembaga	5.801.655.099	6 Lembaga	5.816.159.237	Kel. Karangroto
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Genuksari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Genuksari	11 Laporan	6 Laporan	4.124.080.000	6 Laporan	4.268.422.800	6 Laporan	4.323.912.296	6 Laporan	4.328.236.209	6 Laporan	4.339.056.799	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.124.080.000		4.268.422.800		4.323.912.296		4.328.236.209		4.339.056.799	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	4.124.080.000	6 Lembaga	4.268.422.800	6 Lembaga	4.323.912.296	6 Lembaga	4.328.236.209	6 Lembaga	4.339.056.799	Kel. Genuksari
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Banjardowo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Banjardowo	11 Laporan	6 Laporan	2.961.800.000	6 Laporan	3.065.463.000	6 Laporan	3.105.314.019	6 Laporan	3.108.419.333	6 Laporan	3.116.190.381	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.961.800.000		3.065.463.000		3.105.314.019		3.108.419.333		3.116.190.381	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	2.961.800.000	6 Lembaga	3.065.463.000	6 Lembaga	3.105.314.019	6 Lembaga	3.108.419.333	6 Lembaga	3.116.190.381	Kel. Banjardowo
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Gebangsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Gebangsari	11 Laporan	6 Laporan	2.896.560.000	6 Laporan	2.997.939.600	6 Laporan	3.036.912.815	6 Laporan	3.039.949.728	6 Laporan	3.047.549.602	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.896.560.000		2.997.939.600		3.036.912.815		3.039.949.728		3.047.549.602	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	2.896.560.000	6 Lembaga	2.997.939.600	6 Lembaga	3.036.912.815	6 Lembaga	3.039.949.728	6 Lembaga	3.047.549.602	Kel. Gebangsari
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Trimulyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Trimulyo	11 Laporan	6 Laporan	1.073.560.000	6 Laporan	1.111.134.600	6 Laporan	1.125.579.350	6 Laporan	1.126.704.929	6 Laporan	1.129.521.691	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.073.560.000		1.111.134.600		1.125.579.350		1.126.704.929		1.129.521.691	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	1.073.560.000	6 Lembaga	1.111.134.600	6 Lembaga	1.125.579.350	6 Lembaga	1.126.704.929	6 Lembaga	1.129.521.691	Kel. Trimulyo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Penggaron Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Penggaron Lor	11 Laporan	6 Laporan	1.951.400.000	6 Laporan	2.019.699.000	6 Laporan	2.045.955.087	6 Laporan	2.048.001.042	6 Laporan	2.053.121.045	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.951.400.000		2.019.699.000		2.045.955.087		2.048.001.042		2.053.121.045	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	1.951.400.000	6 Lembaga	2.019.699.000	6 Lembaga	2.045.955.087	6 Lembaga	2.048.001.042	6 Lembaga	2.053.121.045	Kel. Penggaron Lor
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Muktiharjo Lor	11 Laporan	6 Laporan	1.271.360.000	6 Laporan	1.315.857.600	6 Laporan	1.332.963.749	6 Laporan	1.334.296.713	6 Laporan	1.337.632.454	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.271.360.000		1.315.857.600		1.332.963.749		1.334.296.713		1.337.632.454	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	1.271.360.000	6 Lembaga	1.315.857.600	6 Lembaga	1.332.963.749	6 Lembaga	1.334.296.713	6 Lembaga	1.337.632.454	Kel. Muktiharjo Lor
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Bangetayu Kulon	11 Laporan	6 Laporan	5.514.840.000	6 Laporan	5.707.859.400	6 Laporan	5.782.061.572	6 Laporan	5.787.843.634	6 Laporan	5.802.313.243	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.514.840.000		5.707.859.400		5.782.061.572		5.787.843.634		5.802.313.243	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	5.514.840.000	6 Lembaga	5.707.859.400	6 Lembaga	5.782.061.572	6 Lembaga	5.787.843.634	6 Lembaga	5.802.313.243	Kel. Bangetayu Kulon
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Bangetayu Wetan	11 Laporan	6 Laporan	3.911.520.000	6 Laporan	4.048.423.200	6 Laporan	4.101.052.702	6 Laporan	4.105.153.754	6 Laporan	4.115.416.639	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.911.520.000		4.048.423.200		4.101.052.702		4.105.153.754		4.115.416.639	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	3.911.520.000	6 Lembaga	4.048.423.200	6 Lembaga	4.101.052.702	6 Lembaga	4.105.153.754	6 Lembaga	4.115.416.639	Kel. Bangetayu Wetan
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Terboyo Kulon	11 Laporan	6 Laporan	414.920.000	6 Laporan	429.442.200	6 Laporan	435.024.949	6 Laporan	435.459.974	6 Laporan	436.548.624	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				414.920.000		429.442.200		435.024.949		435.459.974		436.548.624	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	414.920.000	6 Lembaga	429.442.200	6 Lembaga	435.024.949	6 Lembaga	435.459.974	6 Lembaga	436.548.624	Kel. Terboyo Kulon

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Terboyo Wetan	11 Laporan	6 Laporan	546.440.000	6 Laporan	565.565.400	6 Laporan	572.917.750	6 Laporan	573.490.667	6 Laporan	574.924.395	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				546.440.000		565.565.400		572.917.750		573.490.667		574.924.395	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga	6 Lembaga	546.440.000	6 Lembaga	565.565.400	6 Lembaga	572.917.750	6 Lembaga	573.490.667	6 Lembaga	574.924.395	Kel. Terboyo Wetan
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%	100%	14.150.000	100%	28.640.402	100%	41.626.806	100%	42.103.173	100%	43.600.394	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				14.150.000		28.640.402		41.626.806		42.103.173		43.600.394	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	14.150.000	1 Lembaga	28.640.402	1 Lembaga	41.626.806	1 Lembaga	42.103.173	1 Lembaga	43.600.394	Kecamatan Genuk
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	100%	100%	40.020.220	100%	50.496.612	100%	89.733.901	100%	93.500.973	100%	120.011.298	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				40.020.220		50.496.612		89.733.901		93.500.973		120.011.298	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2028		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2029		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2030		Ket.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	12 Laporan	40.020.220	12 Laporan	50.496.612	12 Laporan	89.733.901	12 Laporan	93.500.973	12 Laporan	120.011.298	Kecamatan Genuk

Sumber: Kecamatan Genuk 2025

Rencana Pendapatan di Kecamatan Genuk Tahun 2026 – 2030, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Kecamatan Genuk
Tahun 2025 – 2030

URAIAN PENDAPATAN RETRIBUSI	Baseline 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.580.000	3.580.000	4.098.742	4.385.654	4.692.650	5.021.135	5.372.615

Sumber: Kecamatan Genuk 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Genuk Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Genuk yang mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk									
	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Genuk	Angka	96,37	96,55	96,94	97,27	97,54	97,66	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Genuk									
	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Genuk	Persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	
	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Genuk	Angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk									
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk	Angka	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Genuk Kota Semarang
Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan unsur penunjang kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Genuk Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Permasalahan belum optimalnya kualitas kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Genuk Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pemerintahan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Genuk Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

45. KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota SEmarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Perangkat Daerah maka Kecamatan Gajahmungkur wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Gajahmungkur sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan

perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
27. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Gajahmungkur beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hokum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Gajahmungkur yang penyusunannya

berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Gajahmungkur yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUPAN

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

2.1. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 47 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, tugas pokok dari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu, Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Secara rinci tugas camat dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5. penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
15. penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16. penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
17. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
18. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
19. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
    a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
    c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    d. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    e. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
h. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
   b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
   d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:
   a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
   a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
   b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
   a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
   a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   b. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   c. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   d. Evaluasi Kelurahan;
9. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
   a. Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
   b. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   c. Peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   d. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   e. Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
   f. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
   g. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
   h. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
   i. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
   j. Pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
   k. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
   l. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
   a. Pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
   b. Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
   c. Pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;

d. Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan;

11. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan, antara lain:
    a. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
    b. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
    c. Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
    d. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
    e. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
12. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
    a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
13. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
    a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
    b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
    c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
14. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gajahmungkur telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

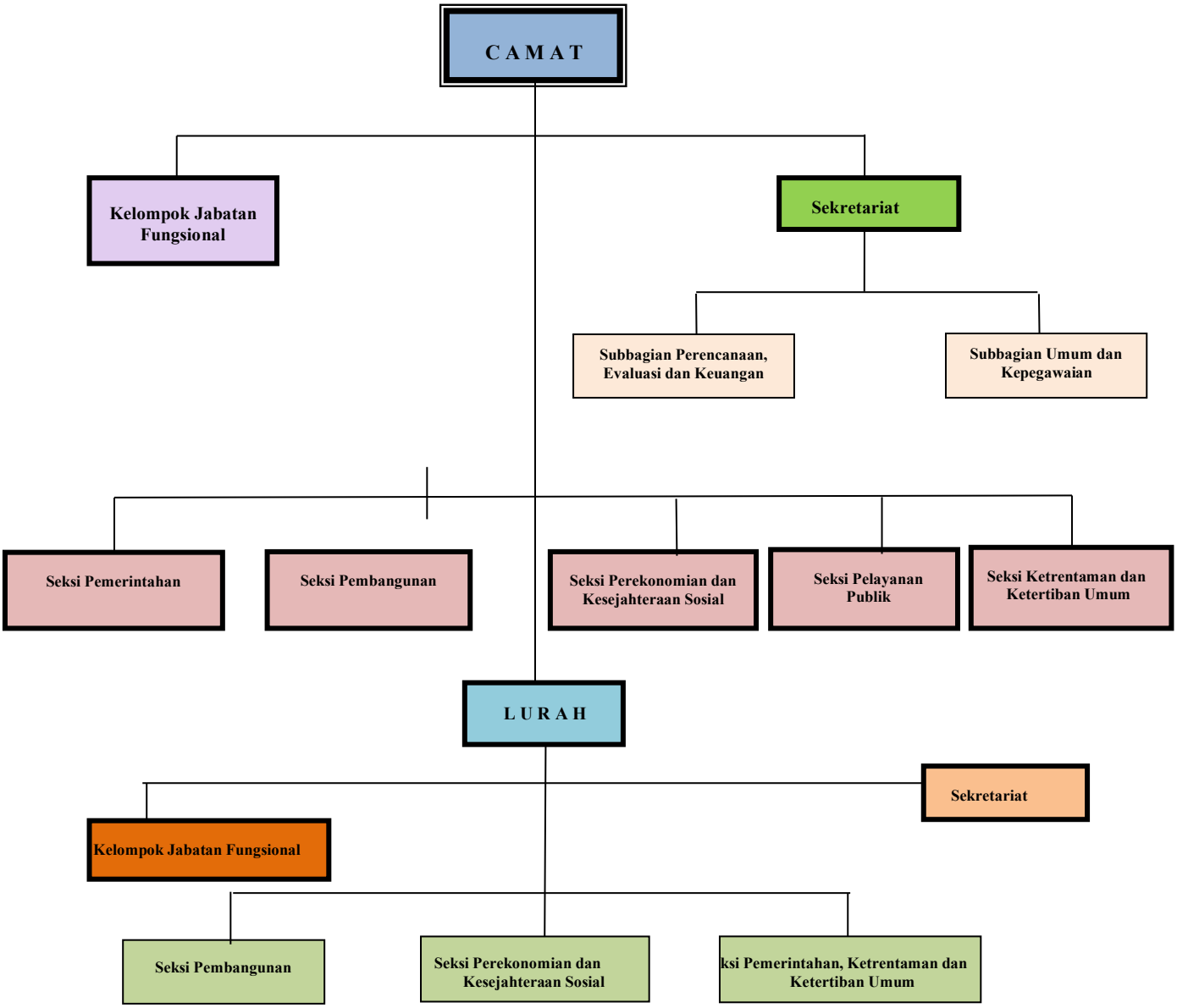

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Gajahmungkur

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

1. Camat;
   Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.
Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Seksi Pemerintahan;
Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

4. Seksi Pembangunan;
Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

6. Seksi Pelayanan Publik;
Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.

8. Jabatan Fungsional.
   Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Kelurahan, terdiri atas:
   a. Lurah;
      Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

   b. Sekretariat;
      Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

   c. Seksi Pembangunan;
      Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.

   d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
      Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi

pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.

e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

2.1.2. SUMBER DAYA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada Juni 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 72 pegawai, dengan jumlah 59 Pegawai Negeri Sipil dan 13 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), yang terdiri dari 41 pegawai laki-laki (66%) dan 31 pegawai perempuan (34%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 22 pegawai, yang terdiri dari 21 pegawai Non ASN laki-laki (95,7%) dan 1 pegawai Non ASN perempuan (4.3%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah sebanyak 94 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Kecamatan Gajahmungkur didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 dan S1 dan D4 sebanyak 44 orang (61 %), D3 sebanyak 22 orang (27%), dan lulusan SMA sebanyak 6 orang (9,7%). Sedangkan untuk pegawai Alih daya, 22 Orang merupakan Lulusan SMA (100%).

Jumlah dan komposisi ASN dan Alih Daya pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan per kelurahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Nama Instansi	S2	S1	D3	SLTA	Total
1	Kecamatan Gajahmungkur	2	17	6	3	28
2	Kelurahan Bendan Duwur	1	3	1	0	5
3	Kelurahan Bendan Ngisor	0	2	2	0	4
4	Kelurahan Bendungan	0	4	2	1	7
5	Kelurahan Gajahmungkur	0	3	2	0	5
6	Kelurahan Karangrejo	0	1	3	0	4
7	Kelurahan Lempongsari	0	3	3	1	7
8	Kelurahan Petompon	0	4	1	0	5
9	Kelurahan Sampangan	2	2	2	1	7
Total Pegawai		**5**	**39**	**22**	**6**	**72**

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, per Agustus 2025

Adapun komposisi prosentase ASN Kecamatan Gajahmungkur menurut Jenjang Pendidikan bisa ditunjukan dengan Diagram sebagai berikut.

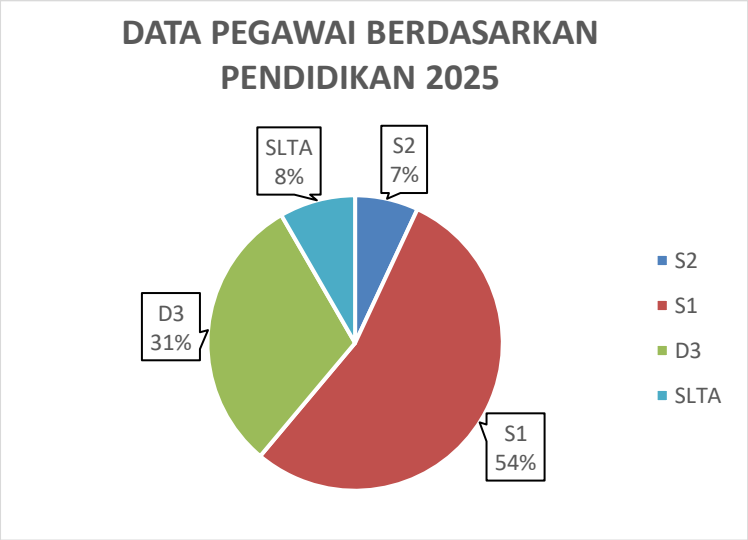

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, per Agustus 2025

Gambar 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 2 pegawai, golongan III sebanyak 45 pegawai, golongan II sebanyak 14 pegawai, golongan IX sebanyak 9 pegawai dan golongan VII sebanyak 4 pegawai dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut yang dirinci per kelurahan.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025
Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Nama Instansi	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/b	IX	VII	Total
1	Kecamatan Gajahmungkur	1	3	0	2	1	7	1	9	4	28
2	Kelurahan Bendan Duwur	0	1	0	2	2	0	0	0	0	5
3	Kelurahan Bendan Ngisor	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4
4	Kelurahan Bendungan	0	2	1	1	1	2	0	0	0	7
5	Kelurahan Gajahmungkur	0	1	0	3	1	0	0	0	0	5
6	Kelurahan Karangrejo	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4
7	Kelurahan Lempongsari	0	1	1	2	1	2	0	0	0	7
8	Kelurahan Petompon	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
9	Kelurahan Sampangan	0	2	0	1	1	3	0	0	0	7
Jumlah Seluruh Golongan		**1**	**14**	**2**	**13**	**11**	**17**	**1**	**9**	**4**	**72**

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, per Agustus 2025

Adapun Komposisi prosentase ASN Kecamatan Gajahmungkur berdasarkan Golongan/Ruang bisa digambarkan dengan diagram dibawah ini

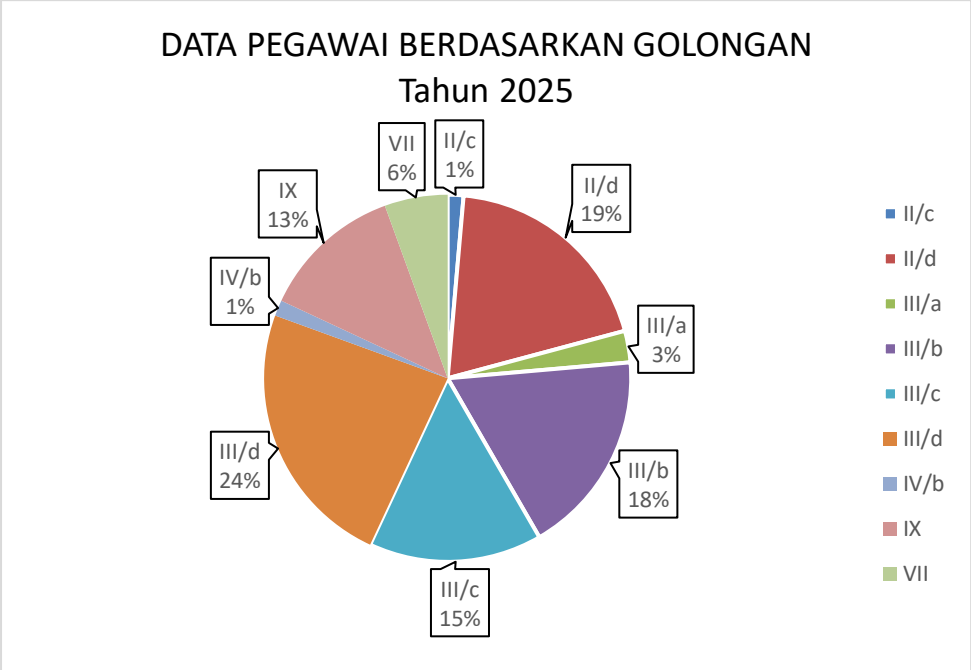

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, per Agustus 2025

Gambar 2.3
Komposisi ASN Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Tahun 2025
Berdasarkan Golongan / Ruang

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 72 ASN terdapat 2 pegawai yang menduduki eselon III, 66 pegawai yang menduduki eselon IV, 3 pegawai yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 31 pegawai yang termasuk dalam jabatan pelaksana, dimana secara detail per kelurahan dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Nama Instansi	III.a	IV.a	IV.b	JF	JFU	Total
1	Kecamatan Gajahmungkur	1	5	2	3	17	28
2	Kelurahan Bendan Duwur	0	0	4	0	1	5
3	Kelurahan Bendan Ngisor	0	0	2	0	2	4
4	Kelurahan Bendungan	0	1	3	0	3	7
5	Kelurahan Gajahmungkur	0	0	4	0	1	5
6	Kelurahan Karangrejo	0	0	3	0	1	4
7	Kelurahan Lempongsari	0	1	4	0	2	7
8	Kelurahan Petompon	0	1	3	0	1	5
9	Kelurahan Sampangan	0	1	4	0	2	7
Total Seluruh Eselon		1	9	29	3	30	72

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang,per Agustus 2025

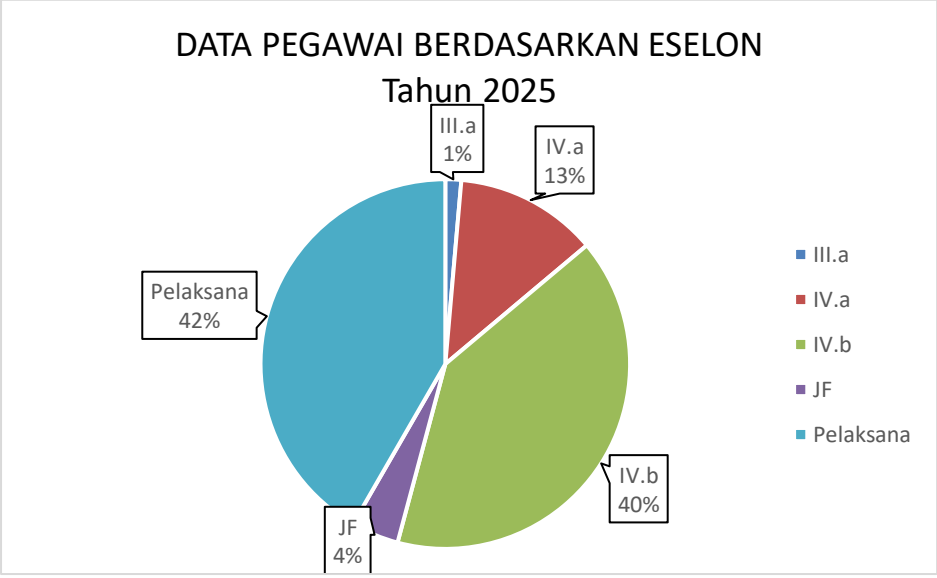

Gambar 2.4
Komposisi ASN Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana

Apabila dilihat dari Ratio Gender jumlah ASN di dominasi oleh laku laki sejumlah 41 orang dan Perempuan sejumlah 31 orang, untuk lebih jelasnya ASN Kecamatan Gajahmungkur per kelurahan bisa dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah ASN Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 Berdasarkan Ratio Gender

No	Nama Instansi	Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Kecamatan Gajahmungkur	12	15	27
2	Kelurahan Bendan Duwur	3	2	5
3	Kelurahan Bendan Ngisor	2	2	4
4	Kelurahan Bendungan	5	2	7
5	Kelurahan Gajahmungkur	4	1	5
6	Kelurahan Karangrejo	3	1	4
7	Kelurahan Lempongsari	5	2	7
8	Kelurahan Petompon	3	3	6
9	Kelurahan Sampangan	4	3	7
Total Pegawai		41	31	72

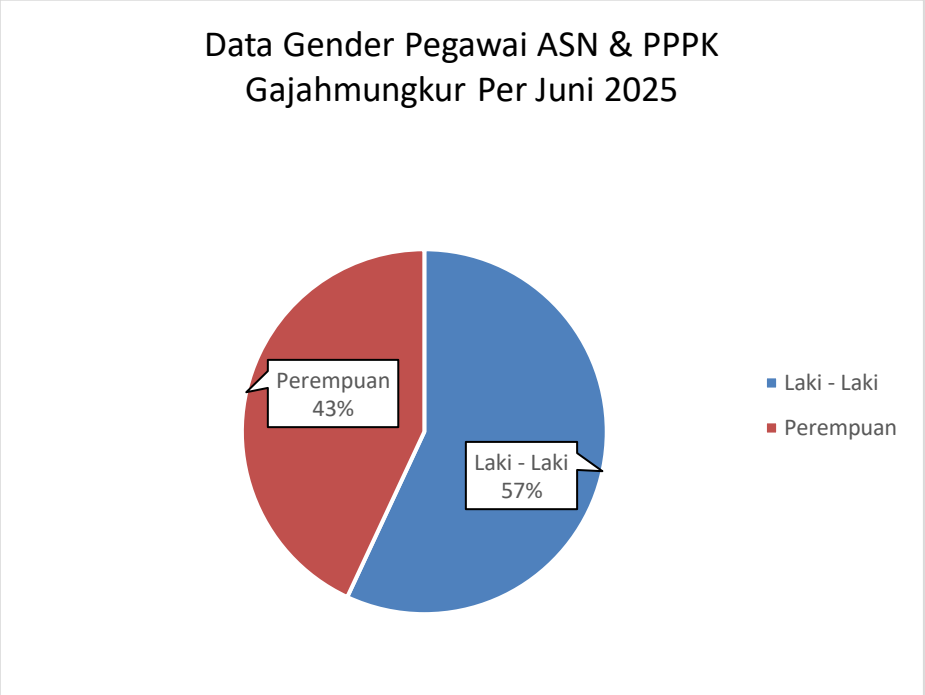

Gambar 2.5
Data Gender ASN Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Ratio Gender

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas Pelayanan Umum di Kecamatan Gajahmungkur, dilaksanakan oleh PNS, PPPK dan tenaga alih daya. Adapun jumlah Pegawai per Kelurahan tersebut bisa dilihat sesuai dengan table dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Nama Instansi	PNS	CPNS	PPPK	ALIH DAYA	TOTAL
1	Kecamatan Gajahmungkur	14	1	13	21	49
2	Kelurahan Bendan Duwur	5	0	0	0	5
3	Kelurahan Bendan Ngisor	4	0	0	0	4
4	Kelurahan Bendungan	7	0	0	0	7
5	Kelurahan Gajahmungkur	5	0	0	0	5
6	Kelurahan Karangrejo	4	0	0	0	4
7	Kelurahan Lempongsari	7	0	0	0	7
8	Kelurahan Petompon	5	0	0	1	6
9	Kelurahan Sampangan	7	0	0	0	7
Total Pegawai		58	1	13	22	94

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, per Agustus 2025

Perbandingan Jumlah Pegawai didominasi oleh Tenaga ASN sebanyak 59 Orang, PPPK sebanyak 13 orang dan alih Daya sejumlah 22 Orang. Ratio tersebut lebih jelas ditunjukan dengan diagram dibawah ini

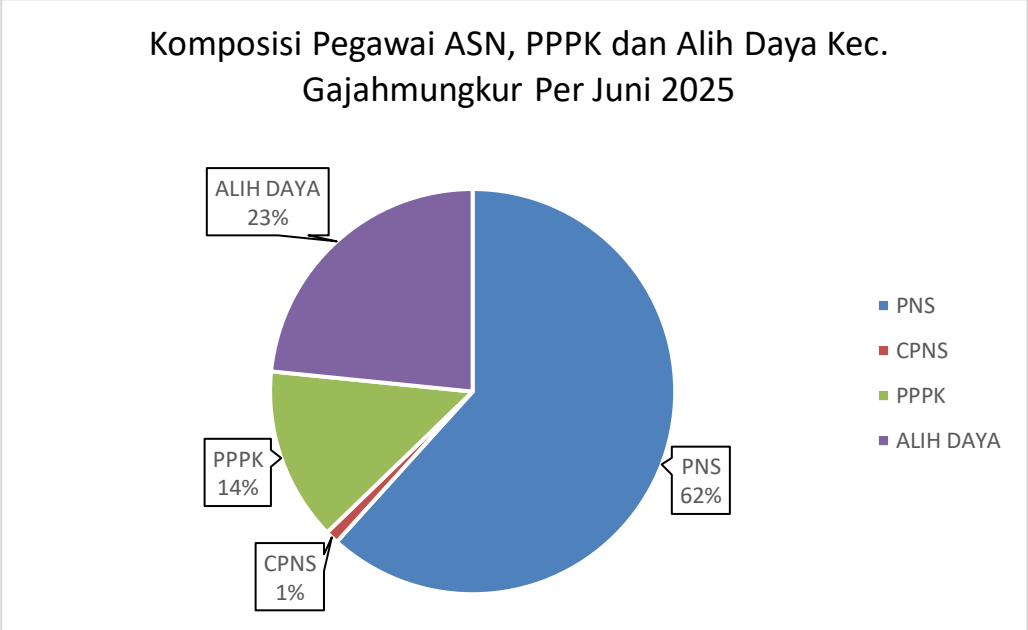

b. Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Gajahmungkur berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Aset Tanah Kecamatan Gajahmungkur

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.604,00	1974	Jl. Sampangan Baru Blok A - 24	Hak Pakai	15/09/2005	HP 33	Kantor, Balai dan Rumdin Kel.Bendan Ngisor	PEMBELIAN	984.856.000
2	Tanah Lapangan Taman lainnya	177,00	1974	Jl. Lamongan Tengah	Hak Pakai	30/04/2007	HP 36	Taman Lamongan Tengah III	PEMBELIAN	108.678.000
3	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	119,00	1975	Jl. Lamongan Tengah	Hak Pakai	23/04/2007	HP 35	Taman Lamongan	PEMBELIAN	73.066.000
4	Tanah Lapangan Taman lainnya	162,00	1975	Jl. Lamongan Tengah	Hak Pakai	30/04/2007	HP 37	Taman Lamongan Tengah I	PEMBELIAN	9.946.800
5	Tanah Lapangan lainnya	668,00	1979	Jl Menoreh Utara X RT.10/I Kel. Sampangan Kec Gajahmungkur	Hak Pakai	23/04/2007	15	Lapangan Bola Voll	PEMBELIAN	40.080.000
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400,00	1983	Jl. Kelud Utara IV/ I	Hak Pakai	26/01/2006	HP 9	Kantor Kelurahan Petompon	PEMBELIAN	200.000.000
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	356,00	1985	Jl. Talangsari Raya No. 52	Hak Pakai	17/11/2005	HP 13	Kantor Kel.Bendan Duwur	PEMBELIAN	97.500.000
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	419,00	1986	Jl. S.Parman No.12 B. Kelurahan Bendungan. Kecamatan Gajahmungkur	Hak Pakai	26/01/2006	HP 12	Kantor dan Balai kel.Bendungan	PEMBELIAN	1.300.000
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	384,00	1989	Jl. Menoreh Raya No. 12	Hak Pakai	17/11/2005	HP 11	Kantor dan Balai Kelurahan Sampangan	PEMBELIAN	506.000.000

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
10	Tanah Lapangan Sepak Bola	3.000,00	1991	Jl. Taman Kelud Selatan	Hak Pakai			Lapangan Sepak Bola dan Volly	PEMBELIAN	750.000.000
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.746,00	1993	Jl. S. Parman No. 38 A Semarang	Hak Pakai	18/02/1999	HP 88	Kec Gajahmungkur	PEMBELIAN	3.492.000.000
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	568,00	1993	Jl. Kelud Selatan II	Hak Pakai	30/04/2007	HP 12	Kantor KUA Kec.Gajahmungkur	PEMBELIAN	300.000.000
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	410,00	1993	Jl. Rinjani No.141. Kelurahan Bendungan. Kecamatan Gajahmungkur	Hak Pakai	30/04/2007	HP 19	Kantor dinas pertamanan sektor candisari	PEMBELIAN	1.300.000
14	Tanah Untuk Makam Umum	1.600,00	1993	Jl. Tampomas Dalam	Hak Pakai			Makam	PEMBELIAN	400.000.000
15	Tanah Untuk Makam Umum	3.229,00	1993	Jl. Kelud Selatan II	Hak Pakai	05/03/2008	HP 21	Makam Umum	PEMBELIAN	800.000.000
16	Tanah Untuk Makam Umum	1.400,00	1993	Jl. Letjend S. Parman	Hak Pakai			Makam Umum	PEMBELIAN	1.400.000.000
17	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	767,00	1994	Jl. Kelud Selatan II	Hak Pakai	30/04/2007	HP 14	Balai RW Karangkumpul	PEMBELIAN	150.000.000
18	Tanah Tegalan	1.806,00	1994	Jl. Tinjomoyo ex bengkok	Hak Pakai	23/04/2007	HP 17	Tegalan	PEMBELIAN	200.000.000
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.000,00	2002	Jl. Sumbing RT.06 RW.III. Kelurahan Bendungan. Kecamatan Gajahmungkur	Hak Pakai	30/04/2007	HP 18	Rumah Dinas dan Balai	PEMBELIAN	1.100.000
20	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	591,00	2005	Jl. Kelud Raya No. 54	Hak Pakai	30/04/2007	HP 13	Rumdin Lurah Petompon	PEMBELIAN	750.000.000
21	Tanah Tegalan	2.420,00	2011	Jl.talangsariraya balai kelurahan	Hak Pakai	20/04/2007	HP 16	Pertanian	PEMBELIAN	1.199.000.000
22	Tanah Lapangan Sepak Bola	8.024,00	2011	Jl.Menoreh Utara IX RT 5 RW 1 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur	Hak Pakai	12/09/2007	HP 20	Lap.Sepak Bola Sampangan Indah	PEMBELIAN	4.660.000.000

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
23	Tanah Lapangan Taman lainnya	306,00	2011	Jl.Menoreh I	Hak Pakai	23/04/2007	HP 13	Taman Menoreh I	PEMBELIAN	215.000.000
24	Tanah Lapangan Taman lainnya	148,00	2011	Jl.Menoreh	Hak Pakai	23/04/2007	HP 14	Taman Sekar Sukma	PEMBELIAN	151.000.000
25	Tanah Lapangan Taman lainnya	110,00	2011	Jl.Meoreh Raya	Hak Pakai	30/04/2007	HP 17	Taman PKK	PEMBELIAN	88.000.000
26	Tanah Lapangan Taman lainnya	208,00	2011	Jl.Menoreh 1	Hak Pakai	30/04/2007	HP 18	Taman Menoreh I	PEMBELIAN	149.600.000
27	Tanah Lapangan Taman lainnya	30,00	2011	Jl.Sultan Agung	Hak Pakai	23/04/2007	HP 100	Taman	PEMBELIAN	33.000.000
28	Tanah Lapangan Taman lainnya	70,00	2011	Jl.Sultan Agung Raya	Hak Pakai	30/04/2007	HP 104	Taman Sultan Agung I	PEMBELIAN	84.000.000
29	Tanah Lapangan Taman lainnya	8.748,00	2011	Jl.Guntur	Hak Pakai	05/04/2008	HP 110	Makam Guntur	PEMBELIAN	10.941.000.000
30	Tanah Lapangan Taman lainnya	465,00	2011	Jl. S.Parman	Hak Pakai	05/06/2007	HP 19	Taman	PEMBELIAN	767.000.000
31	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	608,00	2012	Jl.Telaga Bodas RT 01 RW IV	Hak Pakai	23/04/2007	HP 17	Rumah Dinas Kel.Karangrejo	PEMBELIAN	418.300.000
32	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	172,00	2012	Jl. Menoreh Utara	Hak Pakai	23/04/2007	HP 16	Rumah Dinas Kelurahan Sampangan	PEMBELIAN	137.600.000
33	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	835,00	2012	Jl.Karangrejo Tengah No.19	Hak Pakai	20/04/2007	HP 15	Kantor Kelurahan Karangrejo	PEMBELIAN	1.122.000.000
34	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	939,00	2012	Jl. Merapi 2-A RT 01 RW I	Hak Pakai	20/04/2007	HP 94	Kantor Kelurahan Gajahmungkur	PEMBELIAN	3.201.100.000
35	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	576,00	2012	Jl. Lempongsari 314 C RT 02 RW IV	Hak Pakai	17/11/2005	HP 10	Kantor Kelurahan Lempongsari	PEMBELIAN	587.700.000
36	Tanah Lapangan Taman lainnya	38,00	2012	Jl.Talangsari Raya	Hak Pakai	30/04/2007	HP 18	Taman Patung Wisuda	PEMBELIAN	12.000.000

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
37	Tanah Lapangan Taman lainnya	666,00	2012	Jl.Taman Dieng RT 01 RW I	Hak Pakai	30/04/2007	HP 101	Taman Jl.Gunung Dieng	PEMBELIAN	454.100.000
38	Tanah Lapangan Taman lainnya	61,00	2012	Jl.Slamet RT 05 RW I	Hak Pakai	23/04/2007	HP 99	Taman Jl. Slamet	PEMBELIAN	40.700.000
39	Tanah Lapangan Taman lainnya	106,00	2012	Jl. DR.Sutomo raya	Hak Pakai	30/04/2007	HP 17	Taman Jl.DR.Sutomo (Taman Kasmaran)	PEMBELIAN	303.700.000
40	Tanah Lapangan Taman lainnya	175,00	2012	Jl. Kelud Raya	Hak Pakai	30/04/2007	HP 15	Taman Jl. Kelud Raya	PEMBELIAN	455.600.000
41	Tanah Lapangan Taman lainnya	150,00	2012	Jl. Gunung Sawo	Hak Pakai			Taman (di pakai PKL)	PEMBELIAN	71.900.000
42	Tanah Lapangan Taman lainnya	312,00	2012	Jl. Kaligarang	Hak Pakai			Taman Jl. Kaligarang	PEMBELIAN	473.800.000
43	Tanah Lapangan Taman lainnya	207,00	2012	Jl.Gunung Agung RT 05 RW I	Hak Pakai			Taman Jl. gunung Agung	PEMBELIAN	140.500.000

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, per Agustus 2025

Tabel 2.7
Gedung dan Bangunan Kecamatan Gajahmungkur

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Sampangan Baru A-24	200	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	100.000.000	(Gedung Pertemuan)
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang Baik	72	Jalan Kelud Utara IV/1	72		PEMBELIAN	87.400.000	Hasil Penilaian Nilai Nol Tahun 2016
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	90	Jl.Kelud Utara IV/1	90	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	355.176.432	(Kantor Keurahan)
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Kelud Utara IV/1	200	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	297.798.971	(Balai Kelurahan)
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Rusak Berat	56	Jl.Sampangan Baru A no.24	56	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	198.656.540	usulan penghapusan (Kantor Kel. Bendan Ngisor)
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	105	Jl. Merapi 2-A RT.01 RW.01	105	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	2.175.430.672	(Kantor dan Balai)
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	250	Jl. Rinjani No.141	250	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	60.000.000	(Kantor Dinas Taman Sektor Candisari)
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Rusak Berat	135	Jl.sampangan baru A no.24	135	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.051.446.219	usulan penghapusan (Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan)
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	630	Jl.S.Parman NO.38 A Semarang	630	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	12.644.903.651	50.12.01.00 (Bangunan Kantor Kec. Gajahmungkur)
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	180	Jl. Kelud Selatan II	180	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	162.000.000	50.12.08.00 (Exs. Balai Kelurahan)
11	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	Baik	135	Jl.S.Parman No.38 A Semarang	135	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	303.629.287	50.12.01.00 (Rumah Dinas)
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	150	Jl. Menoreh Raya N0.12	150	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	590.396.050	50.12.05.00 (Kantor dan Balai)
13	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	172	Jl. Menoreh Utara XII	172	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	112.300.000	50.12.05.00 (Rumah Dinas)
14	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	36	Jl.S.Parman No.38 A Semarang	36	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	36.000.000	50.12.01.00 (Bangunan Masjid Kec.Gajahmungkur)

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
15	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Baik	21	Jl.Lempongsari	21	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	23.900.000	50.12.07.00 (Bangunan Koperasi)
16	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Baik	6	Jl.Merapi 2A	6	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	7.400.000	50.12.06.00 (Bangunan Pos Jaga)
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	105	Jl. Karangrejo Tengah N0.19	105	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	632.262.084	50.12.02.00 (Bangunan Gedung PKK)
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Karangrejo Tengah N0.19	200	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	992.184.427	50.12.02.00 (Balai Kelurahan)
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	450	Jl. Karangrejo Tengah N0.19	450	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	673.660.101	50.12.02.00 (Kantor Kelurahan)
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	500	Jl. Lempongsari 314 C RT02 RW IV	500	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	694.287.119	50.12.07.00 (Kantor dan Balai)
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		200	Jl.Lempongsari	200	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	266.592.152	50.12.07.00 (Bangunan Pendopo)
22	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	325	Jl. Telaga Bodas RT.01 RW.02	325	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	58.200.000	50.12.02.00 (Rumah Dinas)
23	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	72	Jl. Merapi 2-A RT.01 RW.01	72	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	120.900.000	50.12.06.00 (Rumah Dinas)
24	Tugu Peringatan Lainnya	Baik	314	Jl.Tugu Suharto	314	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	30.000.000	50.12.03.00 (Tugu Suharto)
25	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	60	Jl. Kelud Raya	60	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	110.092.152	50.12.08.00 (Rumah Dinas)
26	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	45	Jl.Sampangan Baru A-24	45	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	45.000.000	50.12.04.00 (Rumah Dinas Kel. Bendan Ngisor)
27	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	150	Jl. Sumbing RT06 RW III	150	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	80.000.000	50.12.09.00 (Rumah Dinas)
28	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	38	Jl. Talangsari Raya No.52	38	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	207.719.080	50.12.03.00 (Kantor)
29	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	24	Jl. S. Parman No. 38.A	24	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	35.405.000	50.12.01.00 (Bangunan Pagar Rumdin)
30	Bangunan Gedung Instalasi Permanen		16	Jl Merapi 2A	16	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	19.812.500	50.12.06.00 (Bangunan Rumah Pilah Sampah)
31	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		127	Jl S. Parman	127	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	152.219.368	50.12.01.00 (Bangunan serba guna)
32	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	130	Jl.Sampangan Baru A no.24	130	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.077.896.932	(Rehab Kantor Lurah Bendan Ngisor)
33	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	Kurang Baik	300	jl.menoreh utara 12 RW.I kel.sampangan	300	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	149.640.485	50.12.05.00 (gedung balai sampangan lama)

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	303	Jl. Bendan	303	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	922.477.222	Kantor Kelurahan Bendan Duwur
35	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	93.5	Kelurahan Lempongsari	93.5	Tanah Milik Pemda	Pembelian	460.242.664	gedung dan bangunan
36	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	6.8	tembok kampung jajan pasar gajhmungkur	6.8	Tanah Milik Pemda	Pembelian	53.184.247	tembok kampung jajn pasar
37	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	77.74	kelurahan karangrejo	77.74	Tanah Milik Pemda	Pembelian	97.331.000	gedung dan bangunan (PATEN)
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jl.S.Parman no.12 Kelurahan Bendungan	200	Tanah Milik Pemda	Pembelian	403.178.966	bangunan gedung kantor kelurahan bendungan
39	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	11.44	kantor kecamatan gajahmungkur	11.44	Tanah Milik Pemda	Pembelian	57.462.000	gedung dan bangunan (PATEN)
40	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	14.85	Jl. Menoreh Tengah VIII RT.9 RW.4 Jl. Menoreh Barat I RT.5 RW.4 Kel. Sampangan	14.85	Tanah Milik Pemda	Pembelian	48.158.244	bangunan peresapan
41	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	552	kampung jamu kel.petompon	552	Tanah Milik Pemda	Pembelian	40.457.471	pembangunan taman kampung Jamu (kampung tematik)
42	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	7.2	Kampung Jahit Kel. Karangrejo Jl. Karangrejo I RT 06 RW 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur	7.2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.630.115	gapura
43	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	183.78	Jl. Stonen Timur RT.09 RW.09 Kelurahan Gajahmungkur	183.78	Tanah Milik Pemda	Pembelian	79.917.000	dinding balai
44	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	42	jl.lempongsari rt05 rw01 kel.lempongsari	42	Tanah Milik Pemda	Pembelian	112.353.156	Gedung Posyandu
45	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	186	Jl. Ngaglik Lamac RT.1 RW.5 Kelurahan Bendungan	186	Tanah Milik Pemda	Pembelian	46.886.588	pagar
46	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	43.84	Jl.Talangsari Raya Kanan-kiri Patung Wisuda RT.01 RW.07 Kel. Bendan Duwur	43.84	Tanah Milik Pemda	Pembelian	89.993.721	gapura
47	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	24	Jl. Talang Barat RT.03 RW.04 Kel. Bendan Duwur	24	Tanah Milik Pemda	Pembelian	34.806.278	gapura

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
48	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	2	Kampung Jajan Pasar Kel. Gajahmungkur	2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	14.065.681	bangunan gedung kampung tematik jajan pasar
49	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	34.9	kampung batik kel.bendungan	34.9	Tanah Milik Pemda	Pembelian	83.179.151	kampung batik
50	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	200.4	Jl. Lamongan Tengah RT.03 RW.01 Kelurahan Bendan Ngisor	200.4	Tanah Milik Pemda	Pembelian	149.780.000	bangunan taman dantempat bermain
51	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	45	Jl. Menoreh Barat I RT.5 RW.4 Kel. Sampangan	45	Tanah Milik Pemda	Pembelian	23.984.895	bangunan peresapan air limbah
52	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	42.79	Jl. Bukit Unggul I RT.05 RW.02 Kel. Bendan Ngisor	42.79	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.800.000	gapura
53	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	76.8	Jl. Ngaglik Baru RT.1,5 RW.1 Kelurahan Bendungan	76.8	Tanah Milik Pemda	Pembelian	46.886.588	pagar
54	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	32.04	taman Kampung Jajan Pasar Kel. Gajahmungkur	32.04	Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.262.469	taman kampung jajan pasar
55	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	9.19	Jl. Selorejo RT.01 RW.05 Kel. Bendan Duwur	9.19	Tanah Milik Pemda	Pembelian	20.752.249	gapura
56	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	3	signage gapura kampung jajan pasar kel.gajahmungkur	3	Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.194.032	signage gapura
57	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	4.58	Jl. Menoreh Tengah VII RT.02 RW.04 Kel.Bendan Duwur	4.58	Tanah Milik Pemda	Pembelian	28.744.756	pagar
58	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	16	Kecamatan Gajahmungkur	16	Tanah Milik Pemda	Pembelian	64.073.168	Smoking Area di Kecamatan Gajah Mungkur
59	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	68.2	Jl. Lamongan IV RT.03 RW.01 Kelurahan Bendan Ngisor	68.2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	149.800.000	lapangan volly
60	Pagar Permanen	Baik	33.6	Jl. Lempongsari RT. 03 RW. 05 Kel. Lemponsgari	33.6	Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.447.571	Pagar
61	Pagar Permanen	Baik	9.6	jl.lempongsari rt 01 rw 05 kel.lempongsari	9.6	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.733.428	pagar
62	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	43.2	Jl. Lempongsari RT. 01 RW. 02 Kel. Lempongsari	43.2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	31.751.645	pagar pengaman
63	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	67.44	Jl. Talangsari Raya RT.04 RW.03 Kel. Bendan Duwur	67.44	Tanah Milik Pemda	Pembelian	35.302.994	pagar brc

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
64	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	19.2	Jl.Kaligarang Atas RT.5 RW.4 Kelurahan Petompon	19.2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	16.634.870	pagar
65	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	90.5	Jl. Kelud Raya 56 RT.3 RW.1 Kelurahan Petompon	90.5	Tanah Milik Pemda	Pembelian	59.846.000	pagar rumah dinas
66	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	40.8	Jl. Lempongsari RT.02 RW.02 Kelurahan Lempongsari	40.8	Tanah Milik Pemda	Pembelian	29.098.354	pagar pengaman
67	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	256.2	Jl.Menoreh	256.2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.563.620.701	Lapangan Olah raga /lapangan Bola Volly di wilayah kelurahan Sampangan
68	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	154	kelurahan lempongsari	154	Tanah Milik Pemda	Pembelian	224.446.855	pagar kelurahan lempongsari
69	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	25	Jl.Lempongsari RT.04 RW.06 Kel.Lempongsari	25	Tanah Milik Pemda	Pembelian	89.242.000	Balai RW.VI Lempongsari RT.04 RW.VI
70	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	40	Jl.Ngaglik Lama RT.02 RW.01 Kel.Bendungan	40	Tanah Milik Pemda	Pembelian	312.207.966	Balai Rw.01 Rt.02 Kel Bendungan
71	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	35.7	Jl.Sampangan Baru IV RT.02 RW.02 Kel.Bendan Ngisor	35.7	Tanah Milik Pemda	Pembelian	74.902.000	Gedung Balai dan Taman Bermain Anak Jl.Sampangan Baru IV Kel.Bendan Ngisor
72	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	64	Jl.Telaga Bodas RT.01 RW.04 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur	64	Tanah Milik Pemda	Pembelian	158.166.192	Gedung bangunan Untuk Pagelaran Kampung Tematik Budaya Kel.Karangrejo
73	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	Jl.Menoreh Utara XII RT.05 RW.01 Kel.Sampangan	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	100.414.300	Balai RW.01 Jl.Menoreh Utara XII Kel.Sampangan
74	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	30	Jl.Ngaglik Lama RT.03 RW.05 kel.Bendungan	30	Tanah Milik Pemda	Pembelian	86.330.000	Balai Posyandu Ngaglik Lama RT.03 RW.05 Kel.Bendungan
75	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	27	Lempongsari RT.04 RW.02 Lempongsari	27	Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.551.000	Posyandu RW.02 RT.04
76	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	64	Jl.Kintelan RT.01 RW.03 Kel.Bendungan	64	Tanah Milik Pemda	Pembelian	186.396.966	Rumpin Kintelan RT.01 RW.03
77	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	80	jL.Stonen Selatan V RT.01 Rw.04 Kel.Bendan Ngisor	80	Tanah Milik Pemda	Pembelian	73.326.300	Balai RT.01 RW.04 Jl.Stonen Selatan V Kel.Bendan Ngisor
78	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	177	Jl.Tumpang I RT.02 Rw.05 Kel.Bendan Ngisor	177	Tanah Milik Pemda	Pembelian	388.070.255	Balai RW.v Jl.Tumpang I RT.02 RW.V Kel.Bendan Ngisor

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
79	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	298	Jl.Kendeng IV RW.03 Kel.Bendan Ngisor	298	Tanah Milik Pemda	Pembelian	88.260.300	Balai RW.03 Dan Pos Paud Jl.Kendeng IV Kel.Bendan Ngisor
80	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	45	Jl.Kintelan RT.04 RW.02 Kel Bendungan	45	Tanah Milik Pemda	Pembelian	67.261.300	Gedung Posyandu RT.04 Rw.02 Kel.Bendungan
81	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	24	Jl.Taman Semeru I RT.05 RW.04 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur	24	Tanah Milik Pemda	Pembelian	160.873.966	Pos kamling Jl.Taman Semeru I RT.04 RW.05 Kel Karangrejo
82	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	20	Pos kamling RT.05 RW.01 Kel.Sampangan	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	90.862.000	Pos kamling RT.05 RW.01 Kel.Sampangan
83	Taman Permanen	Baik	100	Jl.Menoreh Utara XII RT.06 RW.01 Kel.Sampangan	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	79.844.000	pembuatanTaman Kampung Tematik Jl.Menoreh Utara XII RT.06 RW.01 dan dan pembuatan Pagar Taman Bendera Lima Kel.Sampangan
84	Taman Permanen	Baik	20.4	Jl.Telaga Bodas RT.01 Rw.04 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur	20.4	Tanah Milik Pemda	Pembelian	70.126.000	Taman Penghijauan untuk Kampung Tematik Budaya Kel.Karangrejo
85	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik	25	Jl.S.Parman 12 B Kel.Bendungan	25	Tanah Milik Pemda	Pembelian	160.115.000	Gapuro Pagar dan Balai Kel.Bendungan
86	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik	80	Kampung Tematik Kel.Bendan Ngisor	80	Tanah Milik Pemda	Pembelian	114.900.000	Kampung Tematik Kel.Bendan Ngisor
87	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik	82	Jl.Lamongan Barat III,VI Lamongan Barat I RT.09 RW.05 Kel.Bendan Ngisor	82	Tanah Milik Pemda	Pembelian	105.000.000	Gapuro Lamongan Barat III RW.05 Kel.Bendan Ngisor
88	Pagar Permanen	Baik	30	Kintelan RT.01 no.178-179 Kel.Bendungan	30	Tanah Milik Pemda	Pembelian	68.389.000	pembuatan bangunan Reling Kintelan dan Jalan setapak
89	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	25	Kampung tematik Kali Kotak RT.05 RW.06 Lempongsari	25	Tanah Milik Pemda	Pembelian	66.498.150	Pembuatan Panggung Kegiatan diatas Kampung Tematik Kali Kotak Kelurahan Lempongsari
90	Bangunan Posyandu	Baik	42	Jl.Talang barat II RT.04 RW.04 Kel.Bendan Duwur	42	Tanah Milik Pemda	Pembelian	171.469.150	Gedung Posyandu RW.04 kel.Bendan Duwur
91	Bangunan Posyandu	Baik	40	Jl.Gunung talang RT.01 Rw.07 Kel.Bendan duwur	40	Tanah Milik Pemda	Pembelian	75.399.150	Bangunan Posyandu RW.07 Kel.Bendan Duwur

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
92	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	35	Jl.Kradenan Baru RT.01 RW.03 Kel.Bendan Duwur	35	Tanah Milik Pemda	Pembelian	65.462.150	Balai Pertemuan di Jl.Kradenan baru RT.01 RW.03
93	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	36	Jl.Kelud Utara RT.01 RW.01 Kel.Petompon	36	Tanah Milik Pemda	Pembelian	85.337.150	Balai Pertemuan RW.01 Jl.Kelud Utara RT.01 RW.01 Kel.Petompon
94	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	12	Jl.Kalilangse RT.06 RW.02 Kel.Gajahmungkur	12	Tanah Milik Pemda	Pembelian	85.357.150	Balai RW.02 Kel Gajahmungkur
95	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	160	Jl.Cikuray RT.03 RW.03 Kel.Gajahmungkur	160	Tanah Milik Pemda	Pembelian	310.720.202	Balai Pertemuan RW.03 Jl.Cikuray kel.Gajahmungkur
96	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	128	Jl Stonen RT.03 RW.04 Kel.Bendan Ngisor	128	Tanah Milik Pemda	Pembelian	80.435.150	Rehab Balai RW.04 Jl.Stonen RT.03 RW.04 bendan Ngisor
97	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	40	kel.Bendungan RW.05	40	Tanah Milik Pemda	Pembelian	165.510.150	Bangunan Rumah pintar dan Posyandu RW.05
98	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	12	Jl.Wilayah RT.09 Kel.Gajahmungkur	12	Tanah Milik Pemda	Pembelian	177.966.116	Bangunan Gedung Pos Paud Di wilayah RW.09 Kel.Gajahmungkur
99	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	20	Jl.Talang sendang RT.01 RW.02 Kel.Bendan Duwur	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	65.581.150	Gedung Pospaud RW.02 Kel.Bendan Duwur
100	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	75	Jl.Lempongsari Timur III RT.05 RW.06 Kel.Lempongsari	75	Tanah Milik Pemda	Pembelian	160.830.150	bangunan gedung Pos Paud Cempaka Jl.Lempongsari Timur III RT.05 RW.06 Lempongsari
101	Makam Bersejarah	Baik	30	Jl.Lempongsari RT.01 RW.05 Lempongsari	30	Tanah Milik Pemda	Pembelian	66.535.150	Rehab Makam Lempongsari RT.01 RW.05 Kel.Lempongsari
102	Pagar Permanen	Baik	19	Jl.Tengger Raya Selatan RT.07 RW.07 Kel.Gajahmungkur	19	Tanah Milik Pemda	Pembelian	67.386.150	Gapuro RW.07 tengger Kel.Gajahmungkur
103	Pagar Permanen	Baik	40	Jl. Talang barat RT01 RW02 Kel.Bendan Duwur	40	Tanah Milik Pemda	Pembelian	130.896.150	Gapuro Kampung Tematik sebagai Icon Angkringan Kampoeng pahlawan,(Panggung dan Kanopi)
104	Pagar Permanen	Baik	12	Jl.Sampangan Baru Blok A RT.03 RW.02	12	Tanah Milik Pemda	Pembelian	72.662.150	Gapuro Sampangan Baru Blok A RT.03 RW.02 Kel.Bendan Ngisor
105	Pagar Permanen	Baik	12	Jl.Stonen Timur RT.04 RW.04 Kel.Bendan Ngisor	12	Tanah Milik Pemda	Pembelian	75.412.150	Gapuro Stonen Timur RT.04 RW.04

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
106	Pagar Permanen	Baik	22	Jl.Lamongan Raya RT.01,02,03,04 RW.05 Kel.Bendan Ngisor	22	Tanah Milik Pemda	Pembelian	85.447.150	Gapuro Lamongan Raya RW.05 Bendan Ngisor
107	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	200	Jl.Sumbing Rt.06 Rw.03 Kel.Bendungan	200	Tanah Milik Pemda	Pembelian	97.605.966	perbaikan balai sumbing
108	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	160	Jl.Bukit Unggul I RT.05 RW.02 Kel.Bendan Ngisor	160	Tanah Milik Pemda	Pembelian	85.916.966	Pembangunan Balai Pertemuan Jl.Bukit Unggul I RT.05 RW.02 Kel.Bendan Ngisor
109	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	144	Jl.Lamongan II RT.04 RW.01 Kel.Bendan Ngisor	144	Tanah Milik Pemda	Pembelian	52.520.966	Pembangunan Balai di Jl.Lamongan II RT.04 RW.01 Kel.Bendan Ngisor
110	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	15	Jl.Kendeng II A &Kendeng II B RT.04,05 RW.03 Kel.Bendan Ngisor	15	Tanah Milik Pemda	Pembelian	62.396.966	Pembuatan PosKamling Jl.Kendeng II A &Kendeng II B RT.04,05 RW.03 Kel.Bendan Ngisor
111	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik	10	Jl.Karangrejo Tengah 2 RT.07 dan 05 RW.03 Kel.Karangrejo	10	Tanah Milik Pemda	Pembelian	85.442.966	Pembuatan Gapura Jl.Karangrejo Tengah 2 Tahun 2023
112	Pagar Permanen	Baik	50	Jl.Tampomas Utara III RT.07 RW.04 Kel.Petompon	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	57.538.966	Pembangunan Pagar BRC Jl.Tampomas Utara RT.07 RW.04 Kel.Petompon
113	Pagar Permanen	Baik	50	Jl.Taman Kelud Selatan RT.04 RW.05 Kel.Petompon	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	137.682.966	pembangunan Pagar BRC Tanggul Jl.Taman Kelud Selatan RT.04 RW.05 Kel.Petompon
114	Pagar Permanen	Baik	100	Jl.Gunung Talang I RT.03 RW.07 Kel.Bendan Duwur	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	88.942.966	Pembuatan Pagar BRC di Jl.Gunung Talang I Rt.03 RW.07 Kel.Bendan Duwur
115	Pagar Permanen	Baik	125	Jl.Kelud Selatan V RT.01 RW.05 Kel.Petompon	125	Tanah Milik Pemda	Pembelian	69.542.966	Pembangunan Pagar BRC Kali Tengkek Jl.Kelud Selatan V RT.01 RW.05 Kel.Petompon
116	Tugu/tanda batas lainnya	Baik	15	Jl.Kradenan baru RT.01 RW.03 Kel.Bendan Duwur	15	Tanah Milik Pemda	Pembelian	52.892.966	Pembangunan Gapura Jl.Kradenan Baru Rt.1 RW.03 Kel.Bendan Duwur
117	Tugu/tanda batas lainnya	Baik	12	Jl.Tumpang II RT.02 RW.05 Kel.Bendan Ngisor	12	Tanah Milik Pemda	Pembelian	52.548.966	Pembangunan Gapura Jl.Tumpang II RT.02 RW.05 Kel.Bendan Ngisor
118	Tugu/tanda batas lainnya	Baik	29	Jl.Watulawang Timur Raya RT.01,03 RW.08 kel.Gajahmungkur	29	Tanah Milik Pemda	Pembelian	82.229.966	Pembangunan Gapura Merdeka Di Jl.Watulawang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
									Timur Raya RW.08 kel.Gajahmungkur
119	Bangunan Posyandu	Baik	56	Balai RW.V kel.Lempongsari	56	Tanah Milik Pemda	Pembelian	111.505.610	Balai Posyandu RW.V
120	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	77	Balai RW.IV kel.Lempongsari	77	Tanah Milik Pemda	Pembelian	90.143.650	Balai RW IV
121	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	419	Jl.Karangrejo RT.01 RW.02 Kel.Karangrejo	419	Tanah Milik Pemda	Pembelian	101.053.513	Betonisasi dan Pembuatan jaring Kawat Lap Voli Jl.Karangrejo Rt.01 RW.02
122	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	40	Jl.Kendeng III kel.Bendan Ngisor	40	Tanah Milik Pemda	Pembelian	76.520.000	Perbaikan PosKamling Kendeng III dan Pemasangan Portal Kendeng I dan III kel.Bendan Ngisor
123	Taman Permanen	Baik	35	Jl.Lempongsari RT.01 RW.04 Kel.Lempongsari	35	Tanah Milik Pemda	Pembelian	65.254.241	Pembuatan Taman toga di Kampung Tematik Beliksari RT.01 RW.04
124	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Baik	70	Jl.Lempongsari raya RT.03 RW.04 kel.Lempongsari	70	Tanah Milik Pemda	Pembelian	152.470.440	Pembangunan taman dan tempat hiburan ,tempat jualan umkm pendukung Beliksari (tahun 2024)
125	Pagar Permanen	Baik	52	Jl.Gunungsawo barat RT.08 RW.04 Kel.Petompon	52	Tanah Milik Pemda	Pembelian	53.327.000	Pagar BRC jalan Gunungsawo barat RT.08 RW.04
126	Tugu/tanda batas lainnya	Baik	23	Jl.Tumpang RT.03 RW.09 Kel. Gajahmungkur	23	Tanah Milik Pemda	Pembelian	61.054.349	Pembangunan Gapura
127	Tugu/tanda batas lainnya	Baik	21	Jl.Malabar RT.02 RW.04 Kel.Gajahmungkur	21	Tanah Milik Pemda	Pembelian	61.084.048	Pembangunan Gapura Gajah Jl.Malabar
128	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	202	Jl.Stonen Kel.Bendan Ngisor	202	Tanah Milik Pemda	Pembelian	38.517.300	Balai RW IV Jl.Stonen Rt.03 Rw.04 Kel.Bendan Ngisor
129	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	10	JlNgaglik Lama RT.02,03 RW.01 Kel.Bendungan	10	Tanah Milik Pemda	Pembelian	39.657.000	Pos Kamling Ngaglik Lama RT.02 RW.01
130	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik	6	Jl.Stonen Selatan V RT.01 RW.04 Kel.Bendan Ngisor	6	Tanah Milik Pemda	Pembelian	39.139.000	Gapuro Stonen Selatan V Rt.01 RW.04 Kel.Bendan Ngisor
131	Pagar Permanen	Baik	80	Kampung Tematik Kel.Bendan Ngisor	80	Tanah Milik Pemda	Pembelian	21.875.000	Pagar Kampung Tematik Kel.Bendan Ngisor
132	Pagar Permanen	Baik	12	Jl. Kendeng I RT.01 RW.03 Bendan Ngisor	12	Tanah Milik Pemda	Pembelian	35.000.000	Bangunan Gapuro Jl.Kendeng I bendan ngisor

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, per Agustus 2025

2.1.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

a. Capaian Kinerja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Pada dokumen Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Kecamatan Gajahmungkur di bidang kewilayahan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.00	92.00	93.00	94.00	95.00	85.00	93.00	93.32	97.77	98.38	100 %	101 %	106 %	105%	104%
2	Nilai AKIP	Angka	70.00	70.01	71.00	72.00	73.00	70.11	72.31	74.90	75.35	76.25	100 %	101 %	105 %	104%	105%
3	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan	Angka	N/A	1.00	1.00	1.00	1.00	N/A	1.00	1.00	1.00	1.00	N/A	100 %	100 %	100%	100%
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	80.00	95.00	97.00	98.00	99.00	80.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100%	100 %	125 %	118%	111%
5	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	40%	40%	45%	50%	N/A	81,68 %	83,36%	97,48 %	99,64%	100%	100 %	105 %	189%	100%
6	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	N/A	87.00	90.00	92.00	95.00	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A	166 %	167 %	154%	143%
7	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100 %	100 %	100%	100%
8	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100 %	100 %	100%	100%
9	Persentase Tersedianya Saran dan Prasarana Perkantoran SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100 %	100 %	100%	100%
10	Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Pelayananan	Persen	90.00	92.00	93.00	94.00	95.00	90.00	93.00	95.30	98.77	98.38	100%	101 %	102 %	105%	104%

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)																
11	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	94.00	96.00	96.00	100.00	100.00	100%	101 %	100 %	103%	102%
12	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	10.00	10.00	15.00	20.00	N/A	10.00	11.23	15.00	20.35	NA	100 %	112 %	100%	102%
13	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	N/A	N/A	60.00	65.00	70.00	N/A	80.00	90.00	100.00	100.00	NA	NA	113 %	118%	

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2020-2024 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang menerima total alokasi anggaran sebesar Rp 207.326.867.298,- dengan realisasi sebesar Rp 200.606.514.064,- (96,76 %). Secara rinci anggaran beserta realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2020-2024 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang menerima total alokasi anggaran sebesar Rp 230.389.271.298 ,- dengan realisasi sebesar Rp 222.474.518.152 ,- (96,56 %). Secara rinci anggaran beserta realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaksanaan Urusan
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	JUMLAH BELANJA	**23.062.404.000**	**48.890.547.858**	**49.499.791.592**	**53.752.380.499**	**55.184.147.349**	**21.868.004.088**	**45.778.205.450**	**48.481.361.443**	**51.812.309.473**	**54.534.637.698**	**94.82**	**93.63**	**97.94**	**96.39**	**98.82**	**31.14**	**31.85**
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	356.884.000	0	0	0	0	345.486.900	0	0	0	0	96,81	0	0	0	0	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	192.390.000	0	0	0	0	192.390.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	35.338.000	0	0	0	0	33.674.000	0	0	0	0	95,29	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	10.937.329.000	0	0	0	0	10.618.138.910	0	0	0	0	97,08	0	0	0	0	0	0
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.396.515.000	0	0	0	0	8.538.577.963	0	0	0	0	90,87	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.379.638.000	0	0	0	0	1.376.826.315	0	0	0	0	99,80	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	188.180.000	0	0	0	0	186.780.000	0	0	0	0	99,26	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	568.480.000	0	0	0	0	568.480.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Intensifikasi PAD	7.650.000	0	0	0	0	7.650.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	19.814.867.858	19.211.257.246	21.124.563.333	22.857.119.985	0	18.478.002.849	18.713.610.397	19.909.384.049	21.292.443.279	0	93,25	97,41	94,25	93,15		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	9.298.040.000	3.372.493.934	3.667.107.640	3.998.318.392	0	8.506.972.347	3.212.751.586	3.406.421.700	3.787.978.144	0	91,49	95,26	92,89	94,74		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	19.520.640.000	26.885.565.412	28.819.187.526	32.137.163.636	0	18.544.273.054	26.528.008.460	28.375.035.224	29.277.230.275	0	95,00	98,67	98,46	91,10		
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	257.000.000	16.735.000	50.830.000	110.863.636	0	248.957.200	14.400.000	35.800.000	102.186.000	0	96,87	86,05	70,43	92,17		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	13.740.000	90.692.000	79.000.000	0	0	12.591.000	85.668.500	74.800.000	0	0	91,64	94,46	94,68		

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

c. Mitra Kecamatan Gajahmungkur dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Gajahmungkur menjalin kemitraan strategis dengan berbagai unsur pelaksana pelayanan yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- Kelurahan, sebagai ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan program pelayanan dasar.
- Koramil, yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
- Polsek, sebagai mitra dalam penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan koordinasi keamanan lingkungan.
- Puskesmas, sebagai penyedia layanan kesehatan primer yang mendukung pencapaian indikator kesehatan masyarakat.
- KORLAP UP2AKBPA, yang berperan dalam pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, serta peningkatan kualitas hidup keluarga.
- Masyarakat, sebagai subjek dan objek pelayanan yang dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- KUA, sebagai mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, pembinaan keluarga sakinah, dan pencatatan pernikahan.
- UPTD Pendidikan, yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui koordinasi program pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan.

d. Inovasi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Terkait pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Siap-SPK (Sistem Informasi Aplikasi Pembuatan - Surat Perintah Kerja)**

   Platform berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pembuatan dan pengelolaan dokumen kontrak pekerjaan, baik untuk proyek konsultan maupun konstruksi. Sistem ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan mengurangi ketergantungan pada metode manual yang memakan waktu serta rentan terhadap kesalahan. Website ini dikembangkan untuk membantu PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), seperti camat, lurah, atau petugas di Kecamatan Gajahmungkur, dalam membuat, mengelola, dan menyimpan dokumen kontrak secara terstruktur dan sesuai standar. Selain itu, Siap-SPK mendukung peningkatan kejelasan dalam pengelolaan proyek, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Dengan hadirnya Siap-SPK,

diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi pengguna dalam menangani dokumen kontrak pekerjaan, serta mendukung percepatan pelaksanaan proyek di tingkat kecamatan dan kelurahan

2. SIMADU (SISTEM MONITORING ADUAN)

Aplikasi ini memungkinkan pemerintah khususnya Kecamatan Gajahmungkur untuk memonitor aduan masyarakat yang disampaikan melalui akun media sosial seperti akun Instagram Walikota Semarang dan dan Instagram resmi milik pemerintah Kota Semarang @semarangpemkot. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menganalisis tren dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil. Aplikasi ini memungkinkan monitoring pengawasan aduan secara real-time, yang dapat mengurangi waktu respons dan memungkinkan tindakan cepat terhadap masalah yang mendesak. Setiap laporan yang terdeteksi, secara real time akan langsung dikirimkan notifikasinya kepada admin kecamatan agar dapat segera ditindaklajuti.Aplikasi ini juga dapat menyederhanakan proses monitoring aduan. Sebelumnya admin kecamatan Gajahmungkur secara rutin harus memantau aduan yang disampaikan lewat kolom komentar, setelah adanya aplikasi Simadu pekerjaan monitoring digantikan oleh BOT yang setiap 1 jam sekali melakukan pemantauan.Penggunaan aplikasi dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat. Aduan dapat diarsipkan dengan baik, dikelola dengan lebih mudah, dan diberi prioritas berdasarkan tingkat urgensi atau dampaknya.

2.1.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Gajahmungkur sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam mengembangkan wilayah melalui perencanaan Pembangunan Kecamatan;
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur;
3. Potensi konflik sosial, gangguan keamanan, gangguan ketenteraman dan ketertiban yang mungkin terjadi di wilayah Kecamatan Gajahmungkur;

4. Kesiapan masyarakat di wilayah Kecamatan Gajahmungkur dalam pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik masih rendah

b. Peluang
Sedangkan peluang bagi Kecamatan Gajahmungkur untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya Adalah :
1. Peran kecamatan dan kelurahan yang semakin besar dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Digitalisasi Pelayanan);
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui keterlibatan aktif bisa menjadi pengawas, pendorong peningkatan kayanan dan memotivasi perubahan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan Awal RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah "**Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan"**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Gajahmungkur terkait dengan

pokok permasalahan kedua, yaitu "**Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan".**

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah **"Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan"**.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif
   Data yang tersedia menunjukkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif belum optimal, dimana dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami peningkatan, yaitu sebesar 80,00% pada Tahun 2020; 95,00% pada Tahun 2021; 100,00% pada Tahun 2022; 100,00% pada Tahun 2023; serta 100,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan.
   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
b. Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan
   Dalam kurun waktu tahun 2021-2024, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional mengalami fluktuasi yaitu sebesar 80,00% pada Tahun 2021; 90,00% pada Tahun 2022, 100,00% pada Tahun 2023; serta 100,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.
   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan serta sinergitas lintas sektor dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Gajahmungkur;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Gajahmungkur;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gajahmungkur;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gajahmungkur;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Gajahmungkur;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gajahmungkur;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gajahmungkur;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gajahmungkur;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Rumusan Permasalahan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Tahun 2025 – 2029

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Gajahmungkur	belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur
2	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Gajahmungkur	belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gajahmungkur
		masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gajahmungkur
3	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, per Agustus 2025

2.2.2 TELAAHAN DOKUMEN LAINNYA

A. TELAAHAN RPJMN 2025 – 2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja

pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif."

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan rasio gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan

kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang.

Misi 2 Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan

Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5 **Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga
menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6 **Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.**

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT

diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7 **Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.**

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Gajahmungkur mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **"Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif"** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **"Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas."**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat" (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Gajahmungkur mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat" (Sasaran ke-18 RPJMD),

dengan indikator sasaran "Indeks Pelayanan Publik" (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD dan sasaran "meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kota semarang" (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran "Persentase partisipasi Masyarakat dalam pembangunan " (Indikator sasaran ke-23)

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah" (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Gajahmungkur mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Gajahmungkur dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

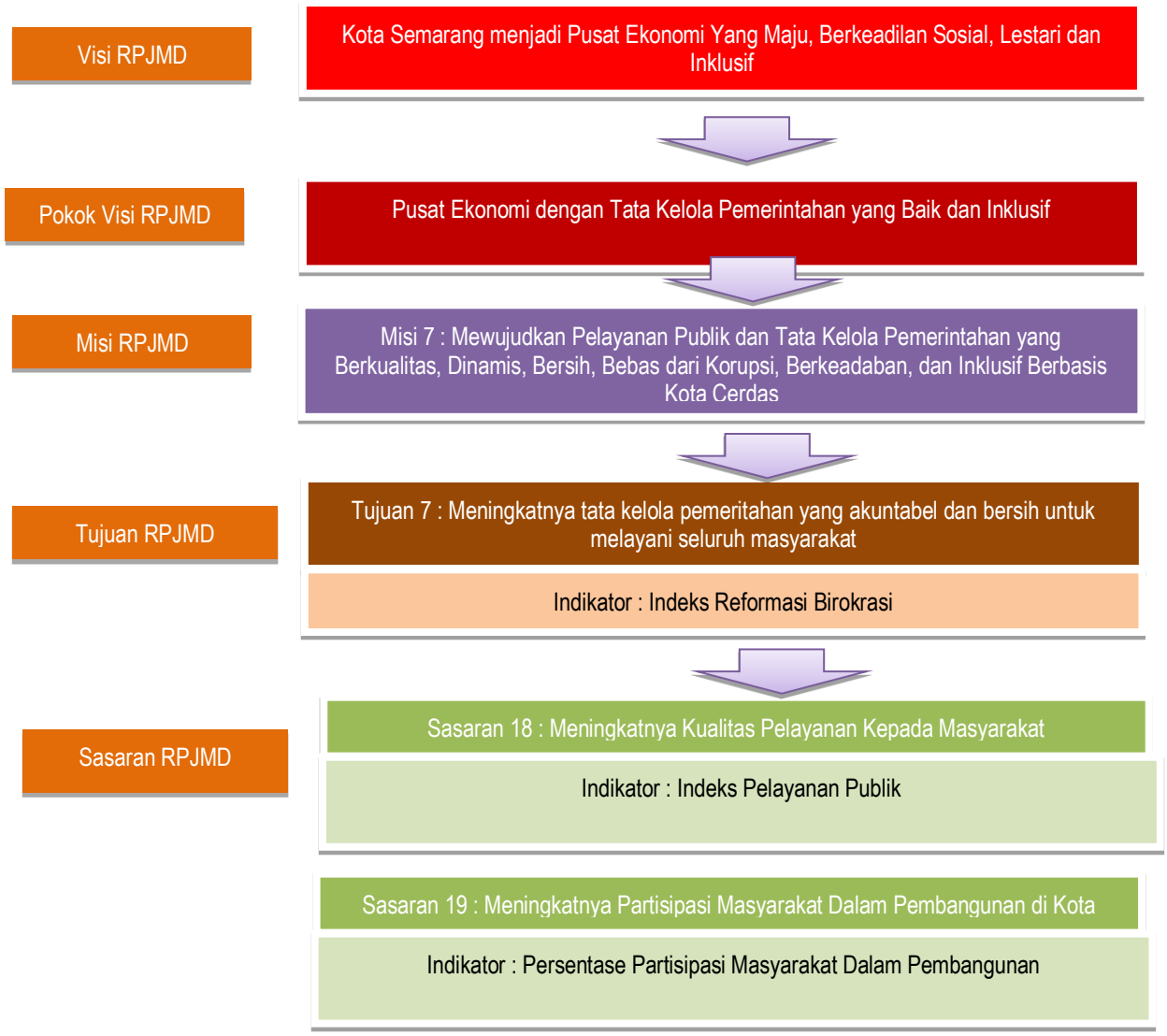

Gambar 2.8
Peranan Kecamatan Gajahmungkur dalam Mendukung Pencapaian
Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Semarang, Kecamatan Gajahmungkur berkomitmen mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Semarang melalui pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.

Upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, serta layanan masyarakat lainnya dengan mengedepankan prinsip kemudahan akses, kepastian prosedur, dan kepuasan masyarakat. Selain itu, Kecamatan Gajahmungkur juga mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital serta memperkuat koordinasi dengan kelurahan untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan warga.

Kecamatan Gajahmungkur senantiasa memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan melalui Musrenbang dan forum aspirasi warga, pengawasan melalui lembaga kemasyarakatan serta media pengaduan publik, hingga evaluasi melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam penilaian hasil pembangunan. Dengan keterlibatan aktif ini, pembangunan menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil pembangunan.

Dalam penyelenggaraan Pembangunan, Kecamatan Gajahmungkur berkomitmen mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. PUG menjadi strategi

penting agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Melalui penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG), Kecamatan Gajahmungkur memastikan bahwa alokasi sumber daya pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat secara adil. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan, serta pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga. Komitmen tersebut diperkuat dengan dukungan terhadap program strategis daerah, antara lain pengembangan Kota Layak Anak (KLA), Gerakan Pembangunan Keluarga (GDPK), serta upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting.

Selain itu, melalui Program Kecamatan Berdaya, dimana tujuan dari program ini adalah menjadikan Kecamatan Gajahmungkur sebagai pusat kegiatan pemberdayaan dan pembangunan daerah yang berfokus pada kelompok rentan dan masyarakat kreatif, Kecamatan Gajahmungkur

terus mendorong pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif melalui penyediaan rumah inspirasi untuk layanan disabilitas, perempuan dan anak serta pemuda; ruang kreatif dan pelatihan; pemberdayaan disabilitas; pemberdayaan lansia; dan pelayanan publik yang responsif.

Di bidang kesehatan masyarakat, penguatan Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi fokus untuk memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses secara merata dan berkualitas. Posyandu 6 SPM adalah konsep posyandu yang mengintegrasikan layanan dasarnya dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup berbagai bidang di luar kesehatan ibu dan anak yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta sosial. Konsep ini merupakan inovasi untuk menjadikan posyandu sebagai pusat pelayanan yang lebih komprehensif dan inklusif di Masyarakat.

Di sisi sosial-kultural, Kecamatan Gajahmungkur senantiasa menjaga kerukunan antarumat beragama dan berkontribusi dalam peningkatan Indeks Harmoni melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa toleransi, kebersamaan, dan persaudaraan di tengah masyarakat dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan; dimensi sosial yaitu akses pendidikan, tingkat kriminalitas, serta stabilitas sosial; dimensi budaya yaitu pluralisme dan pelestarian budaya; dan dimensi keagamaan yaitu Kebebasan beragama, toleransi antarumat beragama, dan moderasi beragama.

Dengan sinergi berbagai program tersebut, Kecamatan Gajahmungkur tidak hanya berperan aktif mendukung pencapaian indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tetapi juga menghadirkan pelayanan

publik yang lebih baik, pembangunan yang adil dan inklusif, serta kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan harmonis.

C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Kecamatan Gajahmungkur tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, rencana struktur ruang meliputi:

1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)
   - Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
   - Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perkotaan Lainnya.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Gajahmungkur Adalah BWK II dengan luas kurang lebih 1.320 hektar, dengan rencana pengembangan fungsi utama sebagai pendidikan kepolisian dan olah raga. Sedangkan rencana penetapan pusat pelayanan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota, berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

2. Sub Pusat Pelayanan Kota, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Gajahmungkur adalah meliputi Kelurahan Sampangan dan Kelurahan Bendan Ngisor.
3. Pusat Lingkungan, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di Kecamatan Gajahmungkur yaitu:
    - pusat lingkungan I terdapat di Kelurahan Sampangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Ngisor dan Kelurahan Bendan Duwur;
    - pusat lingkungan II terdapat di Kelurahan Gajahmungkur dengan daerah pelayanan Kelurahan Bendungan, Kelurahan Lempongsari dan Kelurahan Karangrejo;
    - pusat lingkungan III terdapat di Kelurahan Candi dan Kelurahan Wonotingal dengan daerah pelayanan Kelurahan Kaliwiru dan Kelurahan Tegalsari; dan
    - pusat lingkungan IV terdapat di Kelurahan Jatingaleh dengan daerah pelayanan Kelurahan Jomblang dan Kelurahan Karanganyar Gunung

Selain itu, dalam bidang Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat juga direncanakan akan ada peningkatan Jalan Kaligarang – Jalan Pamularsih dan peningkatan Jalan Kelud Raya – Jalan Menoreh Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Kol. H.R. Hadijanto. Sedangkan Rencana sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan meliputi :pengembangan transportasi wisata sungai Kaligarang dan Banjir Kanal Barat;

Rencana pengembangan perdagangan dan jasa lainnya yaitu pengembangan jasa pameran (exhibition center) dan jasa pertemuan (convention center) di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Semarang Utara;

Untuk rencana pengembangan dalam Kawasan budaya, Kawasan olah raga terdapat Peningkatan Gelanggang Olah Raga Jatidiri, selain itu pada Kawasan wisata terdapat Pengembangan dan peningkatan wisata religi (Kawasan Gereja Blenduk, Kuil Sam Po Kong, Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, dan Kawasan Vihara Watugong), Pengembangan dan peningkatan Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031, Kawasan rawan bencana rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud pada wilayah kecamatan gajahmungkur meliputi :

1. Kelurahan Bendungan;
2. Kelurahan Lempongsari.
3. Kelurahan Bendan Ngisor;
4. Kelurahan Bendan Nduwur; dan
5. Kelurahan Gajahmungkur.

Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, memiliki topografi yang cukup kompleks, dengan kelerengan yang bervariasi antara 0-2% hingga lebih dari 40%. Mayoritas kawasan di Kecamatan Gajahmungkur memiliki topografi dengan kelerengan 2-15%, mencakup luas terbesar yakni 32,62 hektar, serta wilayah dengan kelerengan 15-25% yang memiliki luas 187,06 hektar. Hanya sebagian kecil Kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 40%, dengan luas 64,64 hektar, menunjukkan kondisi yang lebih curam. Variasi topografi ini menjadikan Kecamatan Gajahmungkur rentan terhadap gerakan tanah, terutama saat musim hujan dengan curah hujan tinggi.

E. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA SEMARANG

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4)

Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (5) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan masalah strategis "**Belum optimalnya pelayanan public yang "transparan dan akuntabel**", dan isu strategis "**Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab**", seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.11
Tema isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Pilar	Masalah Strategis	Isu Strategis
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

2.2.3 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-

2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur adalah isu strategis ke tujuh, yaitu “Penyelenggaraan Good Governance”. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”. Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gajahmungkur, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Tabel 2.12
Isu Strategis Kecamatan Gajahmungkur
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Gajahmungkur	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Gajahmungkur						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur
		belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur						peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Gajahmungkur

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gajahmungkur dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal "Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi"; "Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan"; "Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan".

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah "**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**", dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**.

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :

“Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, yaitu :

1. **“Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Gajahmungkur”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).

2. **“Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Gajahmungkur”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

3.2. SASARAN RENSTRA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dimana Kecamatan Gajahmungkur mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Gajahmungkur.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Gajahmungkur maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur**
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gajahmungkur**.
      Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
   2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur**
      Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur**
   Dengan indikator sasaran yaitu “**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gajahmungkur**”.

Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan**
   Dengan indikator sasaran yaitu **"Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur"**.
   Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Gajahmungkur melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Gajahmungkur.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat												
	TUJUAN : **Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur**		**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gajahmungkur**	**Angka**	**94,50**	**95,00**	**95,5**	**96,00**	**96,50**	**97,00**	**97,50**	
		SASARAN 1 : **Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gajahmungkur**	**Angka**	**75,35**	**76,25**	**76,5**	**77,00**	**77,50**	**77,75**	**78,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	**Angka**	**98,38**	**98,39**	**95,25**	**95,50**	**95,75**	**96,00**	**96,25**	
		SASARAN 2 : **Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur**	**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gajahmungkur**	**Persen**	**92,00**	**93,00**	**94,00**	**95,00**	**96,00**	**97,00**	**98,00**	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Gajahmungkur	**Angka**	**78,00**	**79,00**	**80,00**	**81,00**	**82,00**	**83,00**	**84,00**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan												
		SASARAN 3 : **Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan**	**Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur**	**Angka**	**76,00**	**78,00**	**80,00**	**82,00**	**84,00**	**86,00**	**88,00**	

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur 2025

III. 3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

III.3.1 STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur	Memaksimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur	Menguatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur	Menyempurnakan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur	Penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur	Percepatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	Percepatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur 2025

III.3.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gajahmungkur;
(b) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gajahmungkur;
(c) peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(d) peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur;
(e) peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
(f) peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur;
(g) peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Gajahmungkur;
(h) peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gajahmungkur;
(i) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gajahmungkur.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur;
(b) peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gajahmungkur;
(c) peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur;
(d) peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gajahmungkur	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gajahmungkur	
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur	

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur	
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Gajahmungkur	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gajahmungkur	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gajahmungkur	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gajahmungkur
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gajahmungkur
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur

	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Gajahmungkur
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gajahmungkur
			6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gajahmungkur
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gajahmungkur
			3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur 2025

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Gajahmungkur untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Gajahmungkur

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan**		**Camat**
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		S1:Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gajahmungkur		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gajahmungkur beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Kecamatan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gajahmungkur	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan		Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Seksi Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayanan Publik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bendan Duwur	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bendan Duwur
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendan Duwur	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bendan Duwur)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendan Duwur
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Lurah Bendan Ngisor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					yang Ada di Kelurahan Bendan Ngisor	Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendan Ngisor	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bendan Ngisor)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendan Ngisor
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bendungan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bendungan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendungan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bendungan)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendungan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Lurah Gajahmungkur

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					yang Ada di Kelurahan Gajahmungkur	Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Gajahmungkur	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gajahmungkur)	Sekretaris dan Staf Kel. Gajahmungkur
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangrejo	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Karangrejo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Karangrejo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangrejo)	Sekretaris dan Staf Kel. Karangrejo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Lurah Lempongsari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					yang Ada di Kelurahan Lempongsari	Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lempongsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lempongsari)	Sekretaris dan Staf Kel. Lempongsari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Petompon	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Petompon
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Petompon	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Petompon)	Sekretaris dan Staf Kel. Petompon
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Lurah Sampangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					yang Ada di Kelurahan Sampangan	Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Sampangan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sampangan)	Sekretaris dan Staf Kel. Sampangan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Gajahmungkur	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pembangunan Kecamatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bendan Duwur	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bendan Duwur

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Duwur	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bendan Duwur)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendan Duwur
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bendan Ngisor	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bendan Ngisor
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Ngisor	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bendan Ngisor)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendan Ngisor
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bendungan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bendungan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendungan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bendungan)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendungan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gajahmungkur	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Gajahmungkur
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gajahmungkur	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gajahmungkur)	Sekretaris dan Staf Kel. Gajahmungkur
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangrejo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Karangrejo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangrejo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangrejo)	Sekretaris dan Staf Kel. Karangrejo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lempongsari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Lempongsari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lempongsari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lempongsari)	Sekretaris dan Staf Kel. Lempongsari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Petompon	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Petompon
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Petompon	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Petompon)	Sekretaris dan Staf Kel. Petompon
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sampangan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Sampangan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sampangan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Sampangan)	Sekretaris dan Staf Kel. Sampangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang		S3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		Camat
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Staf Seksi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bendan Duwur	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bendan Duwur
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Duwur	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bendan Duwur)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendan Duwur
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bendan Ngisor	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bendan Ngisor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bendan Ngisor)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendan Ngisor
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bendungan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bendungan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendungan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bendungan)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendungan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gajahmungkur	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Gajahmungkur
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gajahmungkur)	Sekretaris dan Staf Kel. Gajahmungkur
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangrejo	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Karangrejo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo)	Sekretaris dan Staf Kel. Karangrejo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lempongsari	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Lempongsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempongsari	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lempongsari)	Sekretaris dan Staf Kel. Lempongsari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Petompon	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Petompon
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petompon	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Petompon)	Sekretaris dan Staf Kel. Petompon
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sampangan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Sampangan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sampangan)	Sekretaris dan Staf Kel. Sampangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Masyarakat di Kelurahan Sampangan		
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Bendan Duwur	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bendan Duwur
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Duwur	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bendan Duwur)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendan Duwur
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Bendan Ngisor	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bendan Ngisor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Ngisor	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bendan Ngisor)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Bendungan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bendungan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendungan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bendungan)	Sekretaris dan Staf Kel. Bendungan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Gajahmungkur	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Gajahmungkur
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Gajahmungkur	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gajahmungkur)	Sekretaris dan Staf Kel. Gajahmungkur
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Karangrejo	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Karangrejo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Karangrejo	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangrejo)	Sekretaris dan Staf Kel. Karangrejo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Lempongsari	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Lempongsari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lempongsari	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lempongsari)	Sekretaris dan Staf Kel. Lempongsari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Petompon	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Petompon
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Petompon	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Petompon)	Sekretaris dan Staf Kel. Petompon
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Sampangan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Sampangan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sampangan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sampangan)	Sekretaris dan Staf Kel. Sampangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan**	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur**		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	**Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan**	**Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	**Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)**	**Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib**		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	**Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
5.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil**			
7.	**Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi**			
8.	**Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK**			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Gajahmungkur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
X.XX KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				**36,358,130,338**		**39,257,891,364**		**40,520,003,056**		**40,751,834,949**		**41,298,678.369**	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				16.681.750.466		18,913.115.187		19.796.825.702		20.550.772.711		20,949,885.593	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang berkualitas**	**100,00 %**	**100, 00 %**	16.681.750.466	**100, 00 %**	18,913.115.187	**100, 00 %**	19.796.825.702	**100, 00 %**	20.550.772.711	**100, 00 %**	20,949,885.593	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	**96,00%**	**96,67%**		**97,00%**		**97,33%**		**97,67%**		**98,00%**		
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**32,205,300**		**39,087,601**		**41,041,981.05**		**43,094,080.10**		**45,248,784.11**	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gajahmungkur beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00 %**	**100, 00 %**	**32,205,300**	**100, 00 %**	**39,087,601**	**100, 00 %**	**41,041,981.05**	**100, 00 %**	**43,094,080.10**	**100, 00 %**	**45,248,784.11**	
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10,000,000		10,500,000		11,025,000		11,576,250		12,155,063	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	10,500,000	4 Dokumen	11,025,000	4 Dokumen	11,576,250	4 Dokumen	12,155,063	
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4,835,400		5,077,170		5,331,029		5,597,580		5,877,459	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,835,400	1 Dokumen	5,077,170	1 Dokumen	5,331,029	1 Dokumen	5,597,580	1 Dokumen	5,877,459	
X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6,190,900		6,500,445		6,825,467		7,166,741		7,525,078	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,190,900	1 Dokumen	6,500,445	1 Dokumen	6,825,467	1 Dokumen	7,166,741	1 Dokumen	7,525,078	
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2,818,200		2,959,110		3,107,066		3,262,419		3,425,540	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,818,200	1 Dokumen	2,959,110	1 Dokumen	3,107,066	1 Dokumen	3,262,419	1 Dokumen	3,425,540	
X.XX.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2,956,000		3,103,800		3,258,990		3,421,940		3,593,036	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,956,000	1 Dokumen	3,103,800	1 Dokumen	3,258,990	1 Dokumen	3,421,940	1 Dokumen	3,593,036	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,060,000	4 Laporan	2,163,000	4 Laporan	2,271,150	4 Laporan	2,384,708	4 Laporan	2,503,943	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	2,060,000	4 Laporan	2,163,000	4 Laporan	2,271,150	4 Laporan	2,384,708	4 Laporan	2,503,943	
X.XX.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3,344,800	1 Dokumen	8,784,076	1 Dokumen	9,223,280	1 Dokumen	9,684,444	1 Dokumen	10,168,666	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3,344,800	1 Dokumen	8,784,076	1 Dokumen	9,223,280	1 Dokumen	9,684,444	1 Dokumen	10,168,666	
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**14,093,224,850**		**14,797,873,573**		**15,528,274,684.90**		**16,280,650,889.99**		**17,084,991,301.35**	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00%**	**100,00%**	**14,093,224,850**	**100,00%**	**14,797,873,573**	**100,00%**	**15,528,274,684.90**	**100,00%**	**16,280,650,889.99**	**100,00%**	**17,084,991,301.35**	
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)			13,625,276,250		14,306,527,543		15,021,841,274		15,772,920,566		16,561,533,695	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	72 Orang	80 Orang	13,625,276,250	80 Orang	14,306,527,543	80 Orang	15,021,841,274	80 Orang	15,772,920,566	80 Orang	16,561,533,695	
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				462,000,000		485,100,000		500,000,000		500,653,572		515,673,179	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	462,000,000	12 Dokumen	485,100,000	12 Dokumen	500,000,000	12 Dokumen	500,653,572	12 Dokumen	515,673,179	
X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2,000,000		2,100,000		2,163,000		2,379,300		2,617,230	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,100,000	1 Laporan	2,163,000	1 Laporan	2,379,300	1 Laporan	2,617,230	
X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2,000,000		2,100,000		2,163,000		2,379,300		2,617,230	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	12 Laporan	2,100,000	12 Laporan	2,163,000	12 Laporan	2,379,300	12 Laporan	2,617,230	
X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1,948,600		2,046,030		2,107,411		2,318,152		2,549,967	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1,948,600	1 Dokumen	2,046,030	1 Dokumen	2,107,411	1 Dokumen	2,318,152	1 Dokumen	2,549,967	
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**89,770,316**		**156,226,513**		**171,849,164.30**		**189,034,080.73**		**207,937,488.80**	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gajahmungkur	**Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur**	**88 Angka**	**89 Angka**	**89,770,316**	**90 Angka**	**156,226,513**	**91 Angka**	**171,849,164.30**	**92 Angka**	**189,034,080.73**	**93 Angka**	**207,937,488.80**	
X.XX.01.1.05. 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5,660,467		6,226,513		6,849,164		7,534,081		8,287,489	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	NA	4 Dokumen	5,660,467	4 Dokumen	6,226,513	4 Dokumen	6,849,164	4 Dokumen	7,534,081	4 Dokumen	8,287,489	
X.XX.01.1.05. 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				84,109,849		150,000,000		165,000,000		181,500,000		199,650,000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	200 orang	84,109,849	200 orang	150,000,000	200 orang	165,000,000	200 orang	181,500,000	200 orang	199,650,000	
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				**296,000,000**		**736,550,000**		**818,377,500**		**812,046,375.00**		**852,648,693.75**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur**	**100,00%**	**100, 00%**	**296,000,000**	**100, 00%**	**736,550,000**	**100, 00%**	**818,377,500**	**100, 00%**	**812,046,375.00**	**100, 00%**	**852,648,693.75**	
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100,000,000		100,000,000		150,000,000		110,250,000		115,762,500	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	5 Paket	100,000,000	5 Paket	100,000,000	5 Paket	150,000,000	5 Paket	110,250,000	5 Paket	115,762,500	
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15,000,000		25,000,000		26,250,000		27,562,500		28,940,625	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10 Paket	8 Paket	15,000,000	8 Paket	25,000,000	8 Paket	26,250,000	8 Paket	27,562,500	8 Paket	28,940,625	
X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				11,000,000		11,550,000		12,127,500		12,733,875		13,370,569	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	11,000,000	12 Laporan	11,550,000	12 Laporan	12,127,500	12 Laporan	12,733,875	12 Laporan	13,370,569	
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150,000,000		250,000,000		262,500,000		275,625,000		289,406,250	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	262,500,000	12 Laporan	275,625,000	12 Laporan	289,406,250	
X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20,000,000		350,000,000		367,500,000		385,875,000		405,168,750	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	350,000,000	4 Dokumen	367,500,000	4 Dokumen	385,875,000	4 Dokumen	405,168,750	
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**10,000,000**		**350,000,000**		**367,500,000**		**385,875,000**		**171,579,086**	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur**	**100,00%**	**100, 00%**	**10,000,000**	**100, 00%**	**350,000,000**	**100, 00%**	**367,500,000**	**100, 00%**	**385,875,000**	**100, 00%**	**171,579,086**	
X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10,000,000		350,000,000		367,500,000		385,875,000		171,579,086	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	19 Unit	10,000,000	19 Unit	350,000,000	19 Unit	367,500,000	19 Unit	385,875,000	19 Unit	171,579,086	
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1,860,000,000**		**2,189,000,000**		**2,220,000,000**		**2,228,690,000**		**2,251,559,000**	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur yang selesai ditindaklanjuti**	**100,00%**	**100, 00%**	**1,860,000,000**	**100, 00%**	**2,189,000,000**	**100, 00%**	**2,220,000,000**	**100, 00%**	**2,228,690,000**	**100, 00%**	**2,251,559,000**	
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180,000,000		189,000,000		220,000,000		228,690,000		251,559,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	180,000,000	12 Laporan	189,000,000	12 Laporan	220,000,000	12 Laporan	228,690,000	12 Laporan	251,559,000	
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				1,680,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1,680,000,000	12 Laporan	2,000,000,000	12 Laporan	2,000,000,000	12 Laporan	2,000,000,000	12 Laporan	2,000,000,000	
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**300,000,000**		**643,800,000**		**649,176,000**		**610,745,591**		**335,252,710.40**	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur sesuai ketentuan**	**100,00%**	**100, 00%**	**300,000,000**	**100, 00%**	**643,800,000**	**100, 00%**	**649,176,000**	**100, 00%**	**610,745,591**	**100, 00%**	**335,252,710.40**	
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				190,000,000		193,800,000		197,676,000		201,629,520		205,662,110	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	190,000,000	20 Unit	193,800,000	20 Unit	197,676,000	20 Unit	201,629,520	20 Unit	205,662,110	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60,000,000		75,000,000		76,500,000		78,030,000		79,590,600	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	122 Unit	60,000,000	122 Unit	75,000,000	122 Unit	76,500,000	122 Unit	78,030,000	122 Unit	79,590,600	
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50,000,000		375,000,000		375,000,000		331,086,071		50,000,000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	50,000,000	9 Unit	375,000,000	9 Unit	375,000,000	9 Unit	331,086,071	9 Unit	50,000,000	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**1,891,960,000**		**2,450,750,000**		**2,751,422,105**		**2,372,130,000**		**2,514,320,500**	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu**	**100,00%**	**100, 00%**	**1,891,960,000**	**100, 00%**	**2,450,750,000**	**100, 00%**	**2,751,422,105**	**100, 00%**	**2,372,130,000**	**100, 00%**	**2,514,320,500**	
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	100, 00%	-	100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%	-	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**117,000,000**		**217,500,000**		**218,050,000**		**118,655,000**		**219,320,500**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait**	**100,00%**	**100, 00%**	**117,000,000**	**100, 00%**	**217,500,000**	**100, 00%**	**218,050,000**	**100, 00%**	**118,655,000**	**100, 00%**	**219,320,500**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5,000,000		5,500,000		6,050,000		6,655,000		7,320,500	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,500,000	1 Laporan	6,050,000	1 Laporan	6,655,000	1 Laporan	7,320,500	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				112,000,000		212,000,000		212,000,000		112,000,000		212,000,000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	3 Dokumen	112,000,000	3 Dokumen	212,000,000	3 Dokumen	212,000,000	3 Dokumen	112,000,000	3 Dokumen	212,000,000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				**839,960,000**		**1,148,000,000**		**1,295,200,000**		**1,232,258,750**		**1,259,250,000**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gajahmungkur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100,00%**	**100, 00%**	**839,960,000**	**100, 00%**	**1,148,000,000**	**100, 00%**	**1,295,200,000**	**100, 00%**	**1,232,258,750**	**100, 00%**	**1,259,250,000**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				354,960,000		500,000,000		550,000,000		450,000,000		450,000,000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	12 Laporan	354,960,000	**100, 00%**	500,000,000	**100, 00%**	550,000,000	**100, 00%**	450,000,000	**100, 00%**	450,000,000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				60,000,000		69,000,000		79,350,000		94,558,750		97,500,000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bendan Duwur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bendan Duwur**	**100.00%**	**100. 00%**	60,000,000	**100. 00%**	69,000,000	**100. 00%**	79,350,000	**100. 00%**	94,558,750	**100. 00%**	97,500,000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bendan Duwur)				60,000,000		69,000,000		79,350,000		94,558,750		97,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Bendan Duwur	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	69,000,000	12 Laporan	79,350,000	12 Laporan	94,558,750	12 Laporan	97,500,000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				60,000,000		69,000,000		79,350,000		94,558,750		97,500,000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bendan Ngisor	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bendan Ngisor**	**100.00%**	**100.00%**	60,000,000	**100.00%**	69,000,000	**100.00%**	79,350,000	**100.00%**	94,558,750	**100.00%**	97,500,000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bendan Ngisor)				60,000,000		69,000,000		79,350,000		94,558,750		97,500,000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	69,000,000	12 Laporan	79,350,000	12 Laporan	94,558,750	12 Laporan	97,500,000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat				60,000,000		80,000,000		92,000,000		94,558,750		97,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Daerah yang ada di Kecamatan													
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bendungan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bendungan**	**100.00%**	**100.00%**	60,000,000	**100.00%**	80,000,000	**100.00%**	92,000,000	**100.00%**	94,558,750	**100.00%**	97,500,000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bendungan)				60,000,000		80,000,000		92,000,000		94,558,750		97,500,000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendungan	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	92,000,000	12 Laporan	94,558,750	12 Laporan	97,500,000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				60,000,000		100,000,000		115,000,000		111,751,250		113,750,000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gajahmungkur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di**	**100.00%**	**100.00%**	60,000,000	**100.00%**	100,000,000	**100.00%**	115,000,000	**100.00%**	111,751,250	**100.00%**	113,750,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Kelurahan Gajahmungkur												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gajahmungkur)				60,000,000		100,000,000		115,000,000		111,751,250		113,750,000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	115,000,000	12 Laporan	111,751,250	12 Laporan	113,750,000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				60,000,000		80,000,000		92,000,000		94,558,750		97,500,000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangrejo	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangrejo**	**100.00%**	**100.00%**	60,000,000	**100.00%**	80,000,000	**100.00%**	92,000,000	**100.00%**	94,558,750	**100.00%**	97,500,000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangrejo)				60,000,000		80,000,000		92,000,000		94,558,750		97,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	92,000,000	12 Laporan	94,558,750	12 Laporan	97,500,000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				60,000,000		80,000,000		92,000,000		94,558,750		97,500,000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lempongsari	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lempongsari**	**100.00%**	**100.00%**	60,000,000	**100.00%**	80,000,000	**100.00%**	92,000,000	**100.00%**	94,558,750	**100.00%**	97,500,000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lempongsari)				60,000,000		80,000,000		92,000,000		94,558,750		97,500,000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Lempongsari	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	92,000,000	12 Laporan	94,558,750	12 Laporan	97,500,000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat				60,000,000		80,000,000		92,000,000		94,558,750		97,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Daerah yang ada di Kecamatan													
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Petompon	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Petompon**	**100.00%**	**100.00%**	60,000,000	**100.00%**	80,000,000	**100.00%**	92,000,000	**100.00%**	94,558,750	**100.00%**	97,500,000	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Petompon)				60,000,000		80,000,000		92,000,000		94,558,750		97,500,000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Petompon	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	92,000,000	12 Laporan	94,558,750	12 Laporan	97,500,000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				65,000,000		90,000,000		103,500,000		103,155,000		110,500,000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sampangan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sampangan**	**100.00%**	**100.00%**	65,000,000	**100.00%**	90,000,000	**100.00%**	103,500,000	**100.00%**	103,155,000	**100.00%**	110,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sampangan)				65,000,000		90,000,000		103,500,000		103,155,000		110,500,000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sampangan	12 Laporan	12 Laporan	65,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	103,500,000	12 Laporan	103,155,000	12 Laporan	110,500,000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**935,000,000**		**1,085,250,000**		**1,238,172,105**		**1,021,216,250**		**1,035,750,000**	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Gajahmungkur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Gajahmungkur**	**100,00%**	**100, 00%**	600,000,000	**100, 00%**	700,000,000	**100, 00%**	795,134,605	**100, 00%**	600,000,000	**100, 00%**	600,000,000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				600,000,000		700,000,000		795,134,605		600,000,000		600,000,000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	12 Laporan	600,000,000	12 Laporan	700,000,000	12 Laporan	795,134,605	12 Laporan	600,000,000	12 Laporan	600,000,000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bendan Duwur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bendan Duwur**	**100.00%**	**100, 00%**	40,000,000	**100, 00%**	46,000,000	**100, 00%**	52,900,000	**100, 00%**	50,916,250	**100, 00%**	52,500,000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bendan Duwur)				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan bendan Duwur	-	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	46,000,000	12 Laporan	52,900,000	12 Laporan	50,916,250	12 Laporan	52,500,000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250	12 Laporan	52,500,000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bendan Ngisor	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bendan Ngisor**	**100.00%**	**100, 00%**	40,000,000	**100, 00%**	46,000,000	**100, 00%**	52,900,000	**100, 00%**	50,916,250	**100, 00%**	52,500,000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bendan Ngisor)				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan bendan Ngisor	-	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	46,000,000	12 Laporan	52,900,000	12 Laporan	50,916,250	12 Laporan	52,500,000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bendungan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bendungan**	**100.00%**	**100, 00%**	40,000,000	**100, 00%**	46,000,000	**100, 00%**	52,900,000	**100, 00%**	50,916,250	**100, 00%**	52,500,000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bendungan)				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendungan	-	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	46,000,000	12 Laporan	52,900,000	12 Laporan	50,916,250	12 Laporan	52,500,000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				50,000,000		57,500,000		66,125,000		60,173,750		61,250,000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gajahmungkur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gajahmungkur**	**100.00%**	**100, 00%**	50,000,000	**100, 00%**	57,500,000	**100, 00%**	66,125,000	**100, 00%**	60,173,750	**100, 00%**	61,250,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gajahmungkur)				50,000,000		57,500,000		66,125,000		60,173,750		61,250,000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gajahmungkur	-	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	57,500,000	12 Laporan	66,125,000	12 Laporan	60,173,750	12 Laporan	61,250,000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangrejo	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangrejo**	**100.00%**	**100, 00%**	40,000,000	**100, 00%**	46,000,000	**100, 00%**	52,900,000	**100, 00%**	50,916,250	**100, 00%**	52,500,000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan karangrejo)				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangrejo	-	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	46,000,000	12 Laporan	52,900,000	12 Laporan	50,916,250	12 Laporan	52,500,000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lempongsari)	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lempongsari)**	**100.00%**	**100, 00%**	40,000,000	**100, 00%**	46,000,000	**100, 00%**	52,900,000	**100, 00%**	50,916,250	**100, 00%**	52,500,000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lempongsari)				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lempongsari	-	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	46,000,000	12 Laporan	52,900,000	12 Laporan	50,916,250	12 Laporan	52,500,000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Petompon	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Petompon**	**100.00%**	**100, 00%**	40,000,000	**100, 00%**	46,000,000	**100, 00%**	52,900,000	**100, 00%**	50,916,250	**100, 00%**	52,500,000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Petompon)				40,000,000		46,000,000		52,900,000		50,916,250		52,500,000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Petompon	-	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	46,000,000	12 Laporan	52,900,000	12 Laporan	50,916,250	12 Laporan	52,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				45,000,000		51,750,000		59,512,500		55,545,000		59,500,000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sampangan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sampangan**	**100.00%**	**100, 00%**	45,000,000	**100, 00%**	51,750,000	**100, 00%**	59,512,500	**100, 00%**	55,545,000	**100, 00%**	59,500,000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Sampangan)				45,000,000		51,750,000		59,512,500		55,545,000		59,500,000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sampangan	0	12 Laporan	45,000,000	12 Laporan	51,750,000	12 Laporan	59,512,500	12 Laporan	55,545,000	12 Laporan	59,500,000	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**195,352,391**		**216,019,819**		**225,015,246**		**226,667,578**		**230,565,087**	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur**	**100,00%**	**100, 00%**	**195,352,391**	**100, 00%**	**216,019,819**	**100, 00%**	**225,015,246**	**100, 00%**	**226,667,578**	**100, 00%**	**230,565,087**	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**195,352,391**		**216,019,819**		**225,015,246**		**226,667,578**		**230,565,087**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**195,352,391**	**12 Kegiatan**	**216,019,819**	**12 Kegiatan**	**225,015,246**	**12 Kegiatan**	**226,667,578**	**12 Kegiatan**	**230,565,087**	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				195,352,391		216,019,819		225,015,246		226,667,578		230,565,087	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	4 Laporan	**195,352,391**	4 Laporan	**216,019,819**	4 Laporan	**225,015,246**	4 Laporan	**226,667,578**	4 Laporan	**230,565,087**	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**82,327,481**		**91,037,368**		**120,000,000**		**95,524,660**		**97,167,189**	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur**	**80,00%**	**82,00%**		**84,00%**		**86,00%**		**88,00%**		**90,00%**		
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**82,327,481**		**91,037,368**		**120,000,000**		**95,524,660**		**97,167,189**	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	82,327,481	**2 Kegiatan**	91,037,368	**2 Kegiatan**	120,000,000	**2 Kegiatan**	95,524,660	**2 Kegiatan**	97,167,189	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				82,327,481		91,037,368		120,000,000		95,524,660		97,167,189	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	82,327,481	100 Orang	91,037,368	100 Orang	120,000,000	100 Orang	95,524,660	100 Orang	97,167,189	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**17,506,740,000**		**17,586,969,490**		**17,626,740,000**		**17,506,740,000**		**17,506,740,000**	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	**Jumlah laporan hasil musrenbang**	**1 Laporan**	**1 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,101,600,000		1,101,600,000		1,101,600,000		1,101,600,000		1,101,600,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Kegiatan	6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/Ormas		3 Pokmas/Ormas		3 Pokmas/Ormas		3 Pokmas/Ormas		3 Pokmas/Ormas		
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bendan Duwur	12 Kegiatan	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bendan Duwur)				75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Duwur	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bendan Ngisor	12 Kegiatan	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bendan Ngisor)				71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bendungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bendungan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bendungan)				71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendungan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				83,600,000		83,600,000		83,600,000		83,600,000		83,600,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gajahmungkur	12 Kegiatan	6 Kegiatan	83,600,000	6 Kegiatan	83,600,000	6 Kegiatan	83,600,000	6 Kegiatan	83,600,000	6 Kegiatan	83,600,000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gajahmungkur)				83,600,000		83,600,000		83,600,000		83,600,000		83,600,000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/Ormas	83,600,000	6 Pokmas/Ormas	83,600,000	6 Pokmas/Ormas	83,600,000	6 Pokmas/Ormas	83,600,000	6 Pokmas/Ormas	83,600,000	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangrejo	12 Kegiatan	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo)				75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lempongsari	12 Kegiatan	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	6 Kegiatan	75,200,000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lempongsari)				75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000		75,200,000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempongsari	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	6 Pokmas/Ormas	75,200,000	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Petompon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Petompon	12 Kegiatan	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	6 Kegiatan	71,000,000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Petompon)				71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petompon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petompon	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	6 Pokmas/Ormas	71,000,000	v	71,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				79,400,000		79,400,000		79,400,000		79,400,000		79,400,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sampangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sampangan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	79,400,000	6 Kegiatan	79,400,000	6 Kegiatan	79,400,000	6 Kegiatan	79,400,000	6 Kegiatan	79,400,000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sampangan)				79,400,000		79,400,000		79,400,000		79,400,000		79,400,000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sampangan	SampanganJumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/Ormas	79,400,000	6 Pokmas/Ormas	79,400,000	6 Pokmas/Ormas	79,400,000	6 Pokmas/Ormas	79,400,000	6 Pokmas/Ormas	79,400,000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**16,345,140,000**		**16,425,369,490**		**16,465,140,000**		**16,345,140,000**		**16,345,140,000**	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Gajahmungkur	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gajahmungkur**	**18 Dokumen**	**1 Dokumen**	130,000,000	**1 Dokumen**	210,229,490	**1 Dokumen**	250,000,000	**1 Dokumen**	130,000,000	**1 Dokumen**	130,000,000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				130,000,000		210,229,490		250,000,000		130,000,000		130,000,000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan Gajahmungkur	3 Lembaga	3 Lembaga	130,000,000	3 Lembaga	210,229,490	3 Lembaga	250,000,000	3 Lembaga	130,000,000	3 Lembaga	130,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,382,400,000		1,382,400,000		1,382,400,000		1,382,400,000		1,382,400,000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di KelurahanBendan Duwur	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bendan Duwur**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	1,382,400,000	**1 Dokumen**	1,382,400,000	**1 Dokumen**	1,382,400,000	**1 Dokumen**	1,382,400,000	**1 Dokumen**	1,382,400,000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bendan Duwur)				1,382,400,000		1,382,400,000		1,382,400,000		1,382,400,000		1,382,400,000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Bendan Duwur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Bendan Duwur	9 Lembaga	6 Lembaga	1,382,400,000	6 Lembaga	1,382,400,000	6 Lembaga	1,382,400,000	6 Lembaga	1,382,400,000	6 Lembaga	1,382,400,000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,426,400,000		1,426,400,000		1,426,400,000		1,426,400,000		1,426,400,000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bendan Ngisor	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bendan Ngisor**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	1,426,400,000	**1 Dokumen**	1,426,400,000	**1 Dokumen**	1,426,400,000	**1 Dokumen**	1,426,400,000	**1 Dokumen**	1,426,400,000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bendan Ngisor)				1,426,400,000		1,426,400,000		1,426,400,000		1,426,400,000		1,426,400,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Bendan Ngisor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Ngisor	9 Lembaga	6 Lembaga	1,426,400,000	6 Lembaga	1,426,400,000	6 Lembaga	1,426,400,000	6 Lembaga	1,426,400,000	6 Lembaga	1,426,400,000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,385,560,000		1,385,560,000		1,385,560,000		1,385,560,000		1,385,560,000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bendungan	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bendungan**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	1,385,560,00	**1 Dokumen**	1,385,560,000	**1 Dokumen**	1,385,560,000	**1 Dokumen**	1,385,560,000	**1 Dokume**	1,385,560,000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bendungan)				1,385,560,000		1,385,560,000		1,385,560,000		1,385,560,000		1,385,560,000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Bendungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendungan	9 Lembaga	6 Lembaga	1,385,560,000	6 Lembaga	1,385,560,000	6 Lembaga	1,385,560,000	6 Lembaga	1,385,560,000	6 Lembaga	1,385,560,000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3,911,320,000		3,911,320,000		3,911,320,000		3,911,320,000		3,911,320,000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gajahmungkur	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gajahmungkur**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	3,911,320,000	**1 Dokumen**	3,911,320,000	**1 Dokumen**	3,911,320,000	**1 Dokumen**	3,911,320,000	**1 Dokumen**	3,911,320,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gajahmungkur)				3,911,320,000		3,911,320,000		3,911,320,000		3,911,320,000		3,911,320,000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Gajahmungkur	9 Lembaga	6 Lembaga	3,911,320,000	6 Lembaga	3,911,320,000	6 Lembaga	3,911,320,000	6 Lembaga	3,911,320,000	6 Lembaga	3,911,320,000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,630,600,000		1,630,600,000		1,630,600,000		1,630,600,000		1,630,600,000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangrejo	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangrejo**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	1,630,600,000	**1 Dokumen**	1,630,600,000	**1 Dokumen**	1,630,600,000	**1 Dokumen**	1,630,600,000	**1 Dokumen**	1,630,600,000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangrejo)				1,630,600,000		1,630,600,000		1,630,600,000		1,630,600,000	**1 Dokumen**	1,630,600,000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Karangrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Karangrejo	9 Lembaga	6 Lembaga	1,630,600,000	6 Lembaga	1,630,600,000	6 Lembaga	1,630,600,000	6 Lembaga	1,630,600,000	6 Lembaga	1,630,600,000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,809,640,000		1,809,640,000		1,809,640,000		1,809,640,000		1,809,640,000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lempongsari**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	1,809,640,000	**1 Dokumen**	1,809,640,000	**1 Dokumen**	1,809,640,000	**1 Dokumen**	1,809,640,000	**1 Dokumen**	1,809,640,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Kelurahan Lempongsari													
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lempongsari)				1,809,640,000		1,809,640,000		1,809,640,000		1,809,640,000		1,809,640,000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lempongsari	9 Lembaga	6 Lembaga	1,809,640,000	6 Lembaga	1,809,640,000	6 Lembaga	1,809,640,000	6 Lembaga	1,809,640,000	6 Lembaga	1,809,640,000	1
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,793,960,000		1,793,960,000		1,793,960,000		1,793,960,000		1,793,960,000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Petompon	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Petompon**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	1,793,960,000	**1 Dokumen**	1,793,960,000	**1 Dokumen**	1,793,960,000	**1 Dokumen**	1,793,960,000	**1 Dokumen**	1,793,960,000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Petompon)				1,793,960,000		1,793,960,000		1,793,960,000		1,793,960,000		1,793,960,000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Petompon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Petompon	9 Lembaga	6 Lembaga	1,793,960,000	6 Lembaga	1,793,960,000	6 Lembaga	1,793,960,000	6 Lembaga	1,793,960,000	6 Lembaga	1,793,960,000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2,566,760,000		2,566,760,000		2,566,760,000		2,566,760,000		2,566,760,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sampangan	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sampangan**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	2,566,760,000	**1 Dokumen**	2,566,760,000	**1 Dokumen**	2,566,760,000	**1 Dokumen**	2,566,760,000	**1 Dokumen**	2,566,760,000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sampangan)				2,566,760,000		2,566,760,000		2,566,760,000		2,566,760,000		2,566,760,000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Sampangan	di Kelurahan sampangan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	6 Lembaga	2,566,760,000	6 Lembaga	2,566,760,000	6 Lembaga	2,566,760,000	6 Lembaga	2,566,760,000	6 Lembaga	2,566,760,000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				8,500,000		8,500,000		8,500,000		8,500,000		8,500,000	
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	**Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan**	100,00%	100,00%	8,500,000	100,00%	8,500,000	100,00%	8,500,000	100,00%	8,500,000	100,00%	8,500,000	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				8,500,000		8,500,000		8,500,000		8,500,000		8,500,000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8,500,000	1 Lembaga Kemasyarakatan	8,500,000	1 Lembaga Kemasyarakatan	8,500,000	1 Lembaga Kemasyarakatan	8,500,000	1 Lembaga Kemasyarakatan	8,500,000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	**Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	100,00%	100,00%	300,000,000	100,00%	300,000,000	100,00%	300,000,000	100,00%	300,000,000	100,00%	300,000,000	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	

Selain memuat tentang Rencana kinerja lima tahun mendatang, Kecamatan Gajahmungkur juga berperan dalam optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2025-2029, Kecamatan turut berperan aktif dalam peningkatan PAD melalui retribusi penyewaan aset di kecamatan dan kelurahan. Berikut akan dijelaskan secara rinci untuk target pendapatan Kecamatan Gajahmungkur

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Kecamatan Gajahmungkur
Kota Semarang

No.	Uraian Pendapatan	Baseline 2024 (Rp)	TARGET TAHUN					Ket
			2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030	
1.	Kegiatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	9.100.000	9.737.000	10.419.000	11.929.000	12.764.000	13.657.000	

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gajahmungkur yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gajahmungkur	Angka	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50	
2	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gajahmungkur	Persen	93	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	
3	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Gajahmungkur	Angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
4	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur	Angka	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan unsur penunjang kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Permasalahan belum optimalnya kualitas kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pemerintahan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

46. KECAMATAN TEMBALANG

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang maka Kecamatan tembalang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya Kecamatan Tembalang, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Tembalang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Semarang melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tembalang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Tembalang bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; dimana disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Tembalang menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
i. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
k. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

m. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
n. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

A. Struktur Organisasi Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

a) Camat
Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan. Sekretariat terdiri atas :
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

d) Seksi Pembangunan
Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

f) Seksi Pelayanan Publik
Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

g) Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.

h) Jabatan Fungsional
Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kelurahan

a. Lurah
Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Sekretariat Kelurahan
Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

c. Seksi Pembangunan Kelurahan
Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.

d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.

e. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Camat Tembalang Kota Semarang.

Susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Kecamatan Tembalang Kota Semarang dapat diihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

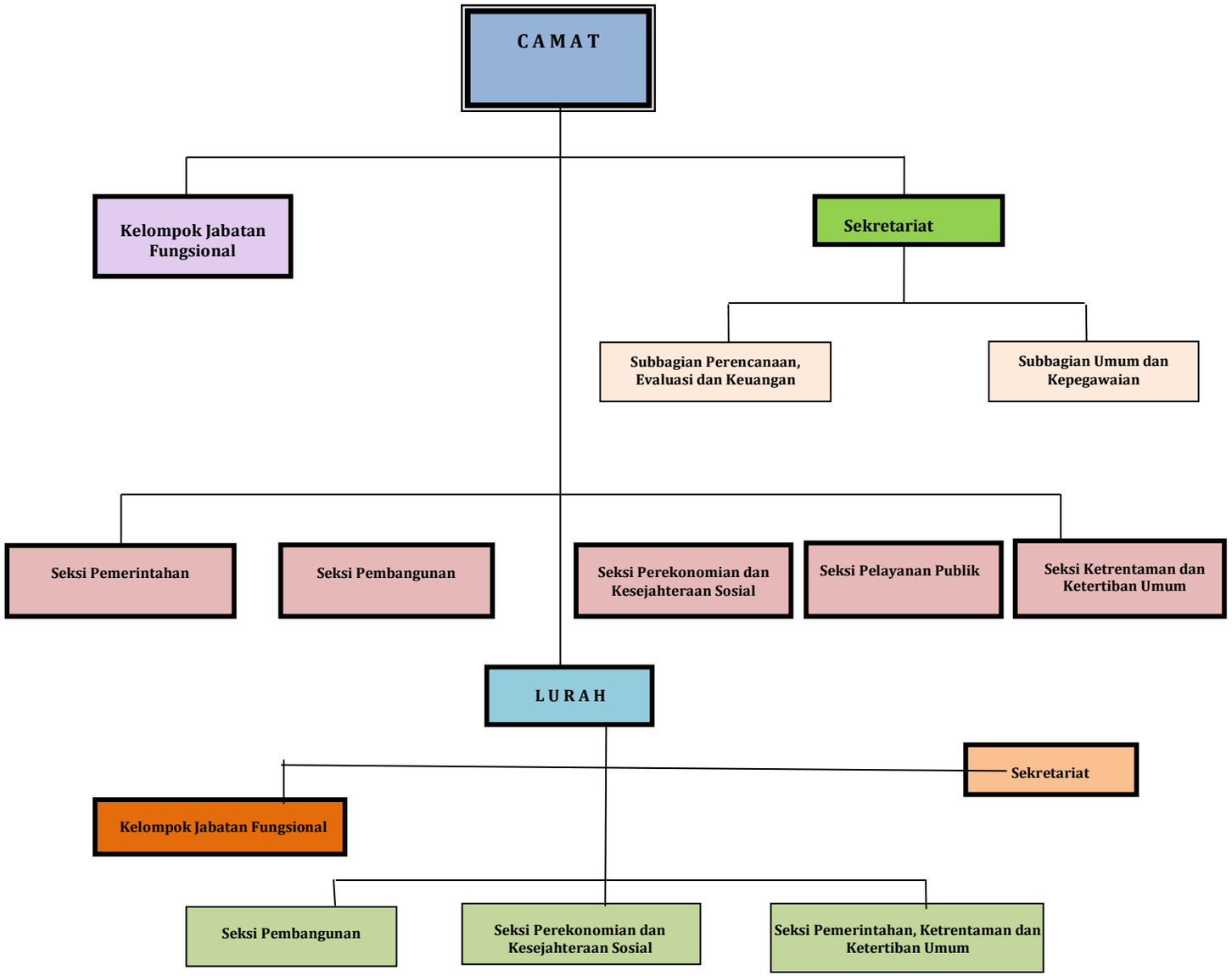

B. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sebagai berikut:

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Sumber Daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang di klasifikasikan berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	1	0	1
1	SMP Sederajat	0	0	2	0	2
2	SMA Sederajat	8	4	18	1	31
3	D3	5	5	2	1	13
4	S1	20	27	13	9	67
5	S2	3	2	0	0	5
6	S3	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 119 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	1	2	3
2	Golongan III	29	29	58
3	Golongan II	5	7	12
4	PPPK Kelas VII	0	0	0
5	PPPK Kelas IX	1	0	1

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Tembalang Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Kecamatan Tembalang Kota Semarang

No	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Lapangan Sepak Bola	7.853,00	1923	Jl. Sambiroto raya	Hak Pakai	04/07/2007	HP 7	Lapangan sepak bola	PEMBELIAN	48.000,00	- Ex-Bengkok - 50.09.13.00
2	Tanah Jalan	2.500,00	1930	Dk. Wonosari Krajan RT 04/ I, persil 12/ S.I	Hak Pakai			Tanah jalan	PEMBELIAN	35.000,00	- Ex-Bengkok - 50.09.02.00
3	Makam Umum/Kuburan Umum	11.819,00	1945	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoedha, SH	Hak Pakai			Makam umum	PEMBELIAN	4.656.686,00	NJOP Rp. 394.000,-/ m2 - Ex-Bengkok - 50.09.01.00
4	Tanah Sawah	3.649,00	1951	J. Anggrek IV a	Hak Pakai	30/04/2007	HP 11	Sawah, pertanian	PEMBELIAN	248.132,00	- Hibah/Sumbangan - 50.09.12.00
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.250,00	1969	Jl. Gondang Raya No. 68	Hak Pakai	04/07/2007	HP 5	Kantor Kelurahan Bulusan, Rumah Dinas & Musholla	PEMBELIAN	356.250,00	- Ex-Bengkok - 50.09.01.00
6	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	847	1972	Jl. Timoho raya	Hak Pakai	06/08/2007	HP 6	Balai Pertemuan Kelurahan Bulusan	PEMBELIAN	333.718,00	- Ex-Bengkok - 50.09.01.00
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	547	1975	Jl. Timoho Raya	Hak Pakai	06/08/2007	HP 24	Kantor Lurah Tembalang & Balai Kel.	PEMBELIAN	31.325,00	- APBD - 50.09.07.00
8	Tanah Sawah	9.155,00	1979	Jl. Bukit Seruni	Hak Pakai	30/04/2007	HP 12	Sawah, pertanian	PEMBELIAN	622.540,00	- Hibah/Sumbangan - 50.09.12.00
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.355,00	1980	Jl. Mangunharjo 1/ 21	Hak Pakai	30/04/2007	HP 7	Rumdin Lurah Mangunharjo	PEMBELIAN	153.600,00	Bekas Kantor Kelurahan - Ex-Bengkok - 50.09.04.00
10	Tanah Tegalan	15.900,00	1980	Dk. Kedungsari RW VIII, Persil 30 klas II	Hak Pakai			Relokasi Korban banjir/tanah longsor	PEMBELIAN	2.035.200,00	hasil penilaian 2016 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
11	Tanah Tegalan	2.400,00	1980	Dk. Kedungsari RW VIII, Persil 31 klas III	Hak Pakai			Relokasi Korban banjir/tanah longsor	PEMBELIAN	307.200,00	hasil penilaian 2016 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00

No	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
12	Tanah Tegalan	18.900,00	1980	Dk. Kebuntaman RW IX, Persil 50 Klas I	Hak Pakai			Tanah kosong dan gersang	PEMBELIAN	2.419.200,00	Tanah tandus tepi sungai Babon Hasil Penilaian 2016 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00 Properti Investasi
13	Tanah Tegalan	13.900,00	1980	Dk. Kebuntaman RW IX, Persil 52 klas VI	Hak Pakai			Tanah kosong dan gersang	PEMBELIAN	1.779.200,00	Tanah tandus tepi sungai Babon Penilaian 2016 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00 Properti Investasi
14	Lain-lain	2.000,00	1989	Dukuh Wonosari Krajan RT 04 RW I, Persil 12/S.I	Hak Pakai	16/09/1990		Tanah MI Al Muta`alimin	PEMBELIAN	256.000,00	- Ex-Bengkok - 50.09.02.00
15	Lain-lain	61	1989	Kp. Wonosari	Hak Pakai	04/07/2007	HP 14	lumbung desa	PEMBELIAN	3.250,00	- Ex-Bengkok - 50.09.02.00
16	Tanah Jalan	2.902,00	1989	Dk. Kedong winong rt 02/ III, persil 46/ S.I	Hak Pakai			tanah jalan	PEMBELIAN	40.628,00	- Ex-Bengkok - 50.09.02.00
17	Tanah Jalan	250	1989	Dk. Wonosari krajan RW I, persil 6 / S.II	Hak Pakai			tanah jalan	PEMBELIAN	3.500,00	- Ex-Bengkok - 50.09.02.00
18	Tanah Jalan	200	1989	Dk. Wonosari Krajan RW I, persil 15/ S.I	Hak Pakai			Tanah jalan	PEMBELIAN	2.800,00	- Ex-Bengkok - 50.09.02.00
19	Tanah Jalan	2.270,00	1989	Dk. Tunggu RT 01/ IX, persil 48/ S.III	Hak Pakai			tanah jalan	PEMBELIAN	113.500,00	- Ex-Bengkok - 50.09.02.00
20	Makam Umum/Kuburan Umum	281	1990	Jl. Klipang RW I	Hak Pakai			Perluasan makam umum	PEMBELIAN	19.108,00	- Hibah/Sumbangan - 50.09.12.00
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	829	1990	Jl. Kompol R. Soekamto	Hak Pakai	30/04/2007	HP 9	Kantor dan Balai Kelurahan Mangunharjo	PEMBELIAN	186.880,00	- Ex-Bengkok - 50.09.04.00

No	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.407,00	1990	Jl. Klipang Raya	Hak Pakai	30/04/2007	HP 10	Kantor & Balai Kelurahan, Rumah Dinas&Gedung PKK	PEMBELIAN	95.676,00	- Hibah/Sumbangan - 50.09.12.00
23	Tanah Lapangan Sepak Bola	12.717,00	1990	Jl. Durenan Indah	Hak Pakai	27/04/2011	HP 10	lapangan sepak bola	PEMBELIAN	1.287.500,00	- Ex-Bengkok - 50.09.04.00
24	Lain-lain	360	1993	Dukuh Tunggu RT 01 RW IX, Persil 48/S.III	Hak Pakai	16/09/1990		MI Nasrul Fajar	PEMBELIAN	46.080,00	Penilaian 2016 - Ex-Bengkok - 50.09.02.00
25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.758,00	1994	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Takrajoedha, SH	Hak Pakai			Kantor Camat, Rumah Dinas, Musholla dan garasi	PEMBELIAN	1.763.200,00	- APBD - 50.09.01.00
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.040,00	1995	Jl. Jangli gabeng raya	Hak Pakai			Kantor & Balai Kelurahan & Rumah Dinas Lurah	PEMBELIAN	326.400,00	- Lain-Lain - 50.09.08.00
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	511	1997	Jl. kedungmundu raya RT 03/ VI	Hak Pakai	29/03/1997	HP 18	Kantor Kelurahan	PEMBELIAN	51.400,00	- Hibah/Sumbangan - 50.09.09.00
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.675,00	1997	Jl. Sendangguwo Raya No. 56 RT 05/ II	Hak Pakai	31/03/1997	HP 5	Kantor & Rumah Dinas Lurah, kantor BKM & Parkir	PEMBELIAN	874.000,00	hasil penilaian tahun 2009 - Lain-Lain - 50.09.11.00
29	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	545	1997	RT02 RW 05 kel Tandang		29/03/1997	HP 14	Balai RW V	Pembelian	69.760,00	Ex Bengkok - Penilaian Tahun 2016
30	Tanah kosong yang tidak diusahakan	6.844,00	1998	RW I Sendangguwo	Hak Pakai	30/04/2007	HP 8	Tanah Kosong	PEMBELIAN	1.042.200,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.11.00
31	Tanah Kebun	40.700,00	1998	Dk. Rowotengah, persil 130	Hak Pakai			Kebun	PEMBELIAN	1.283.300,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
32	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat	460	2001	Jl. Jatimulyo	Hak Pakai	04/07/2007	HP 23	Rumah Dinas Lurah Tembalang	PEMBELIAN	270.000,00	- APBD - 50.09.07.00

No	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
33	Tanah kosong yang tidak diusahakan	2.000,00	2006	Jl. kedungmundu raya	Hak Pakai			Tanah kosong	PEMBELIAN	78.600,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00
34	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.505,00	2007	Jl. Muntuksari Raya, Persil 13	Hak Pakai	05/12/2007	HP 18	Kantor & Balai Kelurahan &Rumah Dinas Lurah	PEMBELIAN	232.000,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
35	Tanah Sawah	4.040,00	2007	Dk. Muntuksari, Persil 64	Hak Pakai	30/04/2007	HP 3	Sawah	PEMBELIAN	112.600,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
36	Tanah Sawah	1.020,00	2007	Dk. Muntuksari, Persil 66	Hak Pakai	30/04/2007	HP 4	Sawah	PEMBELIAN	28.300,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
37	Tanah Sawah	8.220,00	2007	Dk. Rowotengah, Persil 129	Hak Pakai	04/07/2007	HP 6	sawah	PEMBELIAN	274.800,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
38	Tanah Sawah	1.760,00	2007	Dk. Muntuksari Raya, Persil 12	Hak Pakai	04/07/2007	HP 8	Sawah	PEMBELIAN	79.800,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00 Properti Investasi
39	Tanah Sawah	1.155,00	2007	Dk. Muntuksari, Persil 65	Hak Pakai	30/04/2007	HP 5	Sawah	PEMBELIAN	31.700,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
40	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.858,00	2009	Jl. Kedungmundu Raya RT 01/ V	Hak Pakai	30/04/2007	HP 12	Kantor & Rumah Dinas Lurah & Pos Jaga	PEMBELIAN	1.939.000,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00
41	Tanah kosong yang tidak diusahakan	1.384,00	2009	Dk. Muntuksari, Persil 14	Hak Pakai			Tanah Kosong	PEMBELIAN	131.600,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
42	Tanah Sawah	21.875,00	2009	Dk. Pengkol, persil 29	Hak Pakai			Sawah	PEMBELIAN	614.200,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
43	Tanah Sawah	32.350,00	2009	Dk. Pengkol, Persil 26	Hak Pakai			Sawah	PEMBELIAN	856.900,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
44	Tanah Kebun	31.930,00	2009	Dk. Kebuntaman, persil 49	Hak Pakai			Kebun	PEMBELIAN	875.700,00	hasil penilaian tahun 2009 - Hibah/Sumbangan -

No	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
											50.09.03.00 Properti Investasi
45	Tanah Lapangan Sepak Bola	9.100,00	2009	Dk. Kedungsari, Persil 32	Hak Pakai			Lapangan olah raga	PEMBELIAN	850.800,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
46	Tanah Lapangan Sepak Bola	8.135,00	2009	Dk. Pengkol, persil 22	Hak Pakai			Lapangan sepak bola	PEMBELIAN	614.600,00	hasil penilaian tahun 2009 - Ex-Bengkok - 50.09.03.00
47	Makam Umum/Kuburan Umum	1.614,00	2011	Jl. Nilam Raya	Hak Pakai	04/07/2007	HP 8	Makam umum Gebangan	PEMBELIAN	460.000,00	- Lain-Lain - 50.09.13.00
48	Makam Umum/Kuburan Umum	576	2011	Jl. Kp. Sambiroto	Hak Pakai	04/07/2007	HP 9	Makam umum kampung	PEMBELIAN	69.000,00	- Lain-Lain - 50.09.13.00
49	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat	13.318,00	2011	Jl. Tunggu Raya, Persil 48, S.III	Hak Pakai	12/05/2007	HP 16	Rumdin Lurah Meteseh, KUA, Puskesmas Rowosari, Taman	PEMBELIAN	650.350,00	- Lain-Lain - 50.09.02.00
50	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat	747	2011	Jl. Mulawarman Raya	Hak Pakai	30/04/2007	HP 3	Rumah Dinas Lurah Kramas	PEMBELIAN	874.000,00	hasil penilaian tahun 2011 - Lain-Lain - 50.09.06.00
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	438	2011	Jl. Meteseh Raya No.1	Hak Pakai	30/04/2007	HP 11	Kantor & Balai Kel. Meteseh (lama)	PEMBELIAN	43.800,00	- Lain-Lain - 50.09.02.00
52	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.200,00	2011	Jl. Mulawarman Ry. No. 21	Hak Pakai	30/04/2007	HP 2	Kantor & Balai Kelurahan Kramas	PEMBELIAN	1.411.000,00	hasil penilaian tahun 2011 - Lain-Lain - 50.09.06.00
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.068,00	2011	Jl. Raya Sambiroto	Hak Pakai	30/08/2007	HP 10	Kantor Kel., Balai & Rumdin Lurah Sambiroto	PEMBELIAN	36.660,00	- Lain-Lain - 50.09.13.00
54	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	379	2011	Jl. Kinibalu Timur RT 04 RW III	Hak Pakai	29/03/1997	HP 12	Balai RW III	PEMBELIAN	190.000,00	hasil penilaian tahun 2011 - Lain-Lain - 50.09.09.00
55	Tanah Bangunan Balai	355	2011	Jl. Taman Kinibalu RT 08 RW II Tandang	Hak Pakai	14/03/1997	HP 10	Balai RT 04 RW II	PEMBELIAN	174.000,00	hasil penilaian tahun 2011 - Lain-Lain - 50.09.09.00

No	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
	Sidang/Pertemuan										
56	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	122	2011	Jl. Kinibalu RT 08 RW II Tandang	Hak Pakai	14/03/1997	HP 11	Balai RT 08 RW II	PEMBELIAN	61.000,00	hasil penilaian tahun 2011 - Lain-Lain - 50.09.09.00
57	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	136	2011	Jl. Kinibalu I RT 02 RW II	Hak Pakai	14/03/1997	HP 8	Pos Jaga RT 02 RW II	PEMBELIAN	72.000,00	hasil penilaian tahun 2011 - Lain-Lain - 50.09.09.00
58	Tanah Tegalan	6.610,00	2011	Dk. Pengkol Rowosari, Persil 23	Hak Pakai	04/07/2007	HP 9	pertanian	PEMBELIAN	201.200,00	hasil penilaian tahun 2011 – - 50.09.03.00
59	Tanah Tegalan	6.000,00	2011	Dk. Pengkol Kel. Rowosari, Persil 24	Hak Pakai	04/07/2007	HP 10	pertanian	PEMBELIAN	186.300,00	hasil penilaian tahun 2011 - - 50.09.03.00 Properti Investasi
60	Tanah Tegalan	8.510,00	2011	Dk. Pengkol Rowosari, Persil; 25	Hak Pakai	04/07/2007	HP 11	pertanian	PEMBELIAN	250.900,00	Hasil penilaian tahun 2011 - - 50.09.03.00
61	Tanah Lapangan Sepak Bola	2.570,00	2011	Dk. Penggung blok No. 05	Hak Pakai	20/05/2011	HP 7	Lapangan olah raga	PEMBELIAN	813.742,25	Penggantian Proyek Jalan Tol Semarang-Solo - Lain-Lain - 50.09.06.00
62	Tanah Lapangan Sepak Bola	4.604,00	2011	Dk. Penggung Blok 05	Hak Pakai	20/05/2011	HP 6	Tanah lapangan olah raga	PEMBELIAN	1.457.782,85	Penggantian Proyek Jalan Tol Semarang-Solo - Lain-Lain - 50.09.06.00
63	Tanah Lapangan Bola Volly	2.786,00	2011	Jl. Mulawarman Ry.	Hak Pakai	04/12/2007	HP 4	Lapangan Olah Raga	PEMBELIAN	3.288.000,00	hasil penilaian tahun 2011 - Lain-Lain - 50.09.06.00
64	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih	140	2011	Jl. Kinibalu rt 02/ RW III Tandang	Hak Pakai	29/03/1997	HP 13	Sumur Artetis	PEMBELIAN	72.000,00	hasil penilaian tahun 2011 - Lain-Lain - 50.09.09.00
65	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	460	2015	Bukit Graha Bakti Asri	Hak Pakai	19/12/2015		Sarana Pemakaman	PEMBELIAN	527.620,00	BA Nomor 050/681/2015 - Hibah/Sumbangan - 50.09.02.00

No	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
66	Lain-lain	294	2016	Jl. Mucharom VIII Kav. 29 RT 07 R II	Hak Pakai			Tanah kosong	PEMBELIAN	206.388,00	NJOP tahun 2016 = Rp.702.000 / m2 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00 Properti Investasi
67	Lain-lain	200	2016	Jl. Mucharom VIII Kav. 17 RT 07 R II	Hak Pakai			Tanah kosong	PEMBELIAN	140.400,00	NJOP Tahun 2016 = Rp.702.000 / m2 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00 Properti Investasi
68	Lain-lain	195	2016	Jl. Mucharom VIII Kav. 14 RT 07 R II	Hak Pakai			Tanah kosong	PEMBELIAN	136.890,00	NJOP Tahun 2016 = Rp.702.000 / m2 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00 Properti Investasi
69	Lain-lain	195	2016	Jl. Mucharom VIII Kav. 15 RT 07 R II	Hak Pakai			Tanah kosong	PEMBELIAN	136.890,00	NJOP Tahun 2016 = Rp.702.000 / m2 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00 Properti Investasi
70	Lain-lain	195	2016	Jl. Mucharom VIII Kav. 13 RT 07 R II	Hak Pakai			Tanah kosong	PEMBELIAN	136.890,00	NJOP Tahun 2016 = Rp.702.000 / m2 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00 Properti Investasi
71	Lain-lain	195	2016	Jl. Mucharom VIII Kav. 12 RT 07 R II	Hak Pakai			Tanah kosong	PEMBELIAN	136.890,00	NJOP Tahun 2016 = Rp.702.000 / m2 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00 Properti Investasi
72	Lain-lain	293	2016	Jl. Mucharom VIII Kav. 30 RT 07 R II	Hak Pakai			Tanah kosong	PEMBELIAN	205.686,00	NJOP Tahun 2016 = Rp.702.000 / m2 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00 Properti Investasi

No	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
73	Lain-lain	240	2016	Jl. Mucharom VIII Kav. 16 RT 07 R II	Hak Pakai			Tanah kosong	PEMBELIAN	168.480,00	NJOP Tahun 2016 = Rp.702.000 / m2 - Ex-Bengkok - 50.09.10.00

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Tembalang Kota Semarang

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	105	Jl. Banjarsari No. 35		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	148.944,16
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	180	Jl. Gondang raya No. 68		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	250.032,71
3	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	Baik	167	Jl. Muntuksari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	128.522,90
4	Lain-lain	Baik	405	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoedha, SH		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	481.950,00
5	Lain-lain	Baik	60	Dukuh Wonosari Krajan RT 03/ RW I		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	10.000,00
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	150	Jl. Mulawarman Raya No. 21		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	205.760,09
7	Lain-lain	Baik	400	Jl. Mulawarman raya No. 21		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	509.808,83
8	Lain-lain	Baik	288	Jl. Kompol R. Soekanto		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	169.811,03
9	Rumah Negara Golongan III Type B Permane	Baik	100	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoedha, SH		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	44.400,35
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	129	Jl. Muntuksari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	88.373,55
11	Rumah Negara Golongan III Type B Permane	Baik	188	Jl. Mangunharjo I		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	50.000,00
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	140	Jl. Kedungmundu raya 120 B		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	23.000,00
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Kedungmundu RW V		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	207.700,00

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Jangli gabeng raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	59.820,35
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	1350	Jl. Sendangguwo Raya Selatan No. 56		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	224.400,00
16	Lain-lain	Baik	250	Jl. Jangli Gabeng raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	209.658,86
17	Rumah Negara Golongan III Type A Permane	Baik	200	Jl. Mulawarman raya 21		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	240.000,00
18	Rumah Negara Golongan III Type B Permane	Baik	250	Jl. Sendangguwo Raya Selatan No. 56		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	54.000,00
19	Rumah Negara Golongan III Type B Permane	Baik	63	Jl. Jangli gabeng raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	22.320,00
20	Lain-lain	Baik	70	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoedha, SH		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	75.000,00
21	Lain-lain	Baik	49	Jl. Muntuksari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	49.500,00
22	Lain-lain	Baik	200	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoedha, SH		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	160.000,00
23	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	65	Jl. Kompol R. Soekanto		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	45.000,00
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	80	Jl. Kol.H. Iman Soeparto Tjakrajoedha, SH		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	83.931,68
25	Rumah Negara Golongan III Type A Permane	Baik	480	Jl. Jatimulyo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	54.855,00
26	Lain-lain	Baik	270	Jl. Banjarsari No. 35		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	168.500,00
27	Rumah Negara Golongan III Type B Permane	Baik	54	Jl. Klipang Raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	45.000,00
28	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	45	Jl. Prof. Suharso RT 01/ RW IX		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	45.000,00
29	Lain-lain	Baik	110	Jl. Sambiroto raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	249.856,86
30	Rumah Negara Golongan III Type B Permane	Baik	45	Jl. Gondang raya 68		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	54.000,00

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
31	Rumah Negara Golongan III Type B Permane	Baik	80	Jl. Nilam		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	160.000,00
32	Rumah Negara Golongan III Type B Permane	Baik	48	Jl. Kr.gawang baru raya 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	45.000,00
33	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	Baik	160	Jl. Kedungmundu RW V		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	374.558,21
34	Rumah Negara Golongan III Type B Permane	Baik	36	Jl. Kedungmundu RW V		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	27.000,00
35	Lain-lain	Baik	36	Jl. Klipang Raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	42.500,00
36	Lain-lain	Baik	36	RT 02 RW VII		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	15.417,79
37	Lain-lain	Baik	36	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakajoedha, SH		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	126.441,88
38	Lain-lain	Baik	200	RT 01/ I		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	15.353,86
39	Lain-lain	Baik	162	RT 09/ II		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	15.362,50
40	Lain-lain	Baik	4050	RT 03/I		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	19.546,71
41	Lain-lain	Baik	116	Jl. Kaba Utara RW XII		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	15.372,86
42	Lain-lain	Baik	70	RT 01/ III		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.079,29
43	Lain-lain	Baik	175	Jl. Kol. H. IMan Soeparto Tjakrajoedha, SH		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	51.300,00
44	Lain-lain	Baik	18	Jl. Klipang Raya		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	900
45	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	132	Jl. Kol. H. Iman Soeparto T, SH		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	89.826,72
46	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	Baik	238	Jl. Tandang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	79.619,12
47	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	Baik	288	Jl. Sendangguwo Raya No. 56		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	272.380,57
48	Lain-lain	Baik	9	Jl. mangunharjo 1 / 21		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	19.950,00
49	Lain-lain	Baik	681	Jl. Kol. Iman Soeparto Tjakra Joedha no 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	6.484.417,22
50	Lain-lain	Baik	143	Jl. Keramas		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	532.303,70
51	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	231	Jl. Rogojembangan RT 02 RW 5 Tandang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	393.883,00

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
52	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	45	Kecamatan Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	70.057,79
53	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	20	Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang			Pembelian	81.965,31
54	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	20	Kelurahan Meteseh KecamatanTembalang			Pembelian	93.342,02
55	Lain-lain	Baik	30	Jl. Mulawarman RW I Kramas			Pembelian	76.045,17
56	Lain-lain	Baik	290	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoedha, SH			Pembelian	101.600,00
57	Lain-lain	Baik	4	Jl. Mulawarman RW I Kramas			Pembelian	22.449,42
58	Lain-lain	Baik	290	Jl. Kedungmundu Raya			Pembelian	101.615,00
59	Lain-lain	Baik	21	Jl. Mulawarman RW III Kramas			Pembelian	32.035,83
60	Lain-lain	Baik	5152	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoedha, SH		Tanah Milik Pemda	Pembelian	151.750,00
61	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200	Jl. Klipang Raya		Tanah Milik Pemda	Pembelian	197.707,16
62	Pagar	Baik	2463	Jl. Kompol R. Soekamto		Tanah Milik Pemda	Pembelian	200.077,27
63	Pagar	Baik	13425	Jl. Gabeng Raya		Tanah Milik Pemda	Pembelian	197.411,54
64	Pagar	Baik	4025	Jl. Muntuksari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	199.741,34
65	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	100	Jl. Klipang Raya No. 1			Pembelian	209.741,66
66	Bangunan Lapangan sepak bola	Baik	941	Jl. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoedha, SH		Tanah Milik Pemda	Pembelian	817.042,43
67	Bangunan Lapangan Bola Volly	Baik	190	Kelurahan Meteseh		Tanah Milik Pemda	Pembelian	104.307,00
68	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	Baik	310	Jl. Tegalkangkungh RT 03 RW 02 Kedungmundu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	175.731,00
69	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	8355	Jl. Sambiroto Raya		Tanah Milik Pemda	Pembelian	96.882,20
70	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	100	Jl. Fatmawati RT.03/RW.02 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	54.974,00
71	Bangunan Lapangan sepak bola	Baik	8458	Dukuh Krasak Kedungsari RW 8 Rowosari		Tanah Milik Pemda	Pembelian	96.456,80

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak / Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga
72	Bangunan Lapangan Bola Volly	Baik	190	Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang Semarang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	62.000,00
73	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	100	Kelurahan Mangunharjo RT.10/6, Kec. Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	67.932,00
74	Bangunan Lapangan Bola Volly	Baik	220	Kelurahan Sendangguwo RT. 07 RW. V , Kecamatan Tembalang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	54.968,00

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Tembalang Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan kewilayahan yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
1.	**Indikator Tujuan :**															
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	87,00	87,50	88,00	88,35	85,00	87,90	94,97	96,45	96,62	100,00%	101,03%	108,53%	109,60%	109,36%
2.	**Indikator Sasaran :**															
a.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	N/A	-	1	1	1	N/A	-	1	1	1	N/A	-	100,00%	100,00%	100,00%
b.	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
c.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80,00%	95,00%	97,00%	98,00 %	99,00%	80,00%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
d.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	N/A	-	35,00%	-	-	N/A	0	100,00%	0	0
e.	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	81,68%	83,36%	85,04%	86,72%	-	81,68%	83,36%	85,04%	86,72%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
f.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	-	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	-	90,00%	92,00%	100,00%	-	0	100,00%	100,00%	105,26%
3.	**Indikator Program :**															
a.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	-	-	-	100,00%	50,00%	0	0	0
b.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	-	-	-	100,00%	50,00%	0	0	0
c.	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	-	-	-	100,00%	50,00%	0	0	0
d.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
e.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
g.	Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
h.	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	10,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
i.	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	3 Aset	3 Aset	-	-	-	3 Aset	3 Aset	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
j.	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	9 Kelurahan	2 Kelurahan	-	-	-	3 Kelurahan	0	-	-	-	33,33%	0,00%	-	-	-
k.	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan Kelurahan)	1.230 Kegiatan	1.032 Kegiatan	-	-	-	114 Kegiatan	962 Kegiatan	-	-	-	9,26%	93,21%	-	-	-
l.	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	53,00%	55,00%	-	-	-	52,00%	56,00%	-	-	-	98,11%	101,81%	-	-	-
m.	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan	93,81%	95,00%	-	-	-	89,00%	90,00%	-	-	-	94,87%	94,73%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	Pembangunan Dalam Musrenbang															
n.	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	99,04%	99,50%	-	-	-	94,00%	94,00%	-	-	-	94,91%	94,47%	-	-	-
o.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar PATEN	77,00%	100,00%	-	-	-	92,00%	100,00	-	-	-	119,48%	100,00%	-	-	-
p.	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	20.333 Pelayanan	35.125 Pelayanan	-	-	-	35.498 Pelayanan	33.755 Pelayanan -	-	-	-	174,58%	96,09%	-	-	-
q.	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	12 Kelurahan	12 Kelurahan	-	-	-	12 Kelurahan	12 Kelurahan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
r.	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
s.	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP)	90,00%	95,00%	-	-	-	87,20%	77,00%	-	-	-	96,88%	81,05%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	Yang Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan															
t.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	-	85,00%	90,00%	91,00%	92,00%	-	-	91,00%	96,40%	96,62%	-	0	101,11%	105,93%	105,02%
u.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	-	-	97,00%	98,00%	99,00%	-	0	100,00%	100,00%	100,00%
v.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100,00%	10,00%	15,00%	20,00%	-	-	11,00%	17,00%	22,97%	-	0	110,00%	113,33%	114,85%
w.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	65,00%	70,00%	75,00%	-	-	65,00%	70,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	133,33%
4.	**Indikator Lainnya**															

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	73%	75%	-	-	-	72%	75%	-	-	-	98,63%	100,00%	-	-	-
b.	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	-	-	11,14 %	10,52%	9,9%	-	-	15,00%	15,00%	6,05%	-	-	134,64%	142,58%	61,11%
c.	Nilai AKIP	72,04	71,00	71,50	72,00	74,15	72,04	72,04	71,66	74,10	74,75	100,00%	101,46%	100,22%	102,91%	100,80%

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga	Realisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	JUMLAH BELANJA	**34.320.668.000**	**55.966.936.071**	**54.707.380.302**	**59.682.460.397**	**66.112.960.552**	**33.844.027.059**	**52.260.307.237**	**53.206.278.850**	**58.646.233.299**	**60.972.544.735**	**98,60**	**93,37**	**97,25**	**98,26**	**92,24**	**31.14**	**31.85**
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	307.120.000	0	0	0	0	301.926.100	0	0	0	0	98,30	0	0	0	0	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	194.245.000	0	0	0	0	194.245.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	29.500.000	0	0	0	0	24.700.000	0	0	0	0	83,73	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	13.136.925.000	0	0	0	0	12.950.882.600	0	0	0	0	98,58	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga	Realisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.637.142.000	0	0	0	0	18.361.917.959	0	0	0	0	98,52	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	943.606.000	0	0	0	0	938.225.400	0	0	0	0	99,43	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	376.130.000	0	0	0	0	376.130.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	694.800.000	0	0	0	0	694.800.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Intensifikasi PAD	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga	Realisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	0	17.182.892.921	17.024.290.568	15.949.821.727	20.094.636.127	0	16.090.810.702	16.402.656.438	15.479.989.337	18.172.036.469	0	93,64	97,30	98,30	74,00	4,68%	3,42%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	19.044.138.050	3.726.843.741	3.970.965.892	4.447.163.238	0	17.183.408.563	3.507.924.993	3.812.024.013	4.165.522.863	0	90,22	94,10	96,00	74,20	-15,47%	-15,41%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	19.449.055.100	33.746.120.993	39.619.672.778	41.390.276.187	0	18.714.036.403	33.139.521.019	39.228.969.949	38.464.025.403	0	96,22	98,20	99,00	74,20	23,84%	23,37%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	290.850.000	177.125.000	49.000.000	50.835.000	0	270.051.570	130.146.400	38.700.000	47.685.000	0	92,84	73,50	79,00	48,50	-26,92%	-24,71%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	33.000.000	93.000.000	130.050.000	0	0	26.030.000	86.550.000	123.275.000	0	0	78,90	93,10	74,90	55,41%	68,73%

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

c. Inovasi Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Terkait pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Jemput Bola PBB
   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 6 kali dalam dua bulan di Kelurahan di Kecamatan Tembalang.
2. Hotline Kecamatan Tembalang (0815 66 00 500)
   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Tembalang dalam menampung aduan Masyarakat di wilayah Kecamatan Tembalang.

d. Penghargaan Perangkat Daerah

Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh Kecamatan Tembalang selama tahun 2020-2024 antara lain :

1. Juara 1 Evaluasi / Lomba Jogo Tonggo Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi jawa Tengah (Kelurahan Bulusan) Tahun 2020;
2. Juara III Lomba Kampung Pintar Tingkat Kota Semarang (Kelurahan Tandang) Tahun 2020;
3. Juara III Lomba Kampung Bersih, Sehat dan Hijau Tingkat Kota Semarang (Kelurahan Sambiroto) Tahun 2020;
4. Juara I Lomba Gobag Sodor Tingkat Kota Semarang Tahun 2021;
5. Juara III Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah Tingkat Kota Semarang (Kelurahan Sambiroto) Tahun 2021;
6. Juara III Lomba Rumah Sehat Tingkat Kota Semarang (Kelurahan Bulusan) Tahun 2021;
7. Juara III Evaluasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Binaan Tingkat Kota Semarang (Kelurahan Sambiroto) Tahun 2021;
8. Juara Harapan I Lomba Senam Denok Tingkat Kota Semarang Tahun 2021;
9. Juara Harapan I Lomba HatiNya PKK Tingkat Kota Semarang (Kelurahan Jangli) Tahun 2021;
10. Juara Harapan I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan Tembalang Tahun 2021;
11. Juara Harapan III Lomba Tertib Admin Dawis Tingkat Kota Semarang (Kelurahan Tandang) Tahun 2021;
12. Juara III Kategori Video Inovasi PROKLIM Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Kelurahan Sambiroto) Tahun 2023.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Tembalang sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi
   a. Tembalang adalah kawasan pendidikan (UNDIP, Polines, dll.) dan perumahan baru, sehingga arus pendatang cukup tinggi.
   b. Pertumbuhan penduduk menyebabkan beban pelayanan administrasi (KTP, KK, surat pindah, perizinan) meningkat.
   c. Perubahan demografi menuntut adaptasi layanan, terutama untuk mahasiswa, pendatang, dan keluarga muda.
2. Kemacetan dan Aksesibilitas Wilayah

a. Jalan protokol (Jl. Prof. Sudarto, Jl. Ngesrep–Meteseh) sering padat, menghambat mobilitas warga dan aparat.
b. Akses ke wilayah pinggiran (Sendangmulyo, Meteseh) memerlukan perbaikan infrastruktur agar pelayanan cepat.

3. Transformasi Digital yang Belum Merata
   a. Belum semua layanan berbasis online dapat diakses atau digunakan secara optimal.
   b. Literasi digital warga masih bervariasi, terutama di kalangan lansia dan masyarakat berpendidikan rendah.

4. Kualitas SDM dan Beban Kerja
   a. Jumlah pegawai terbatas dibanding beban administrasi dan pelayanan yang terus naik.
   b. Kebutuhan peningkatan kapasitas (pelatihan, kompetensi teknologi) tinggi.

5. Isu Lingkungan dan Bencana
   a. Sebagian wilayah Tembalang rawan banjir lokal dan longsor (terutama daerah perbukitan).
   b. Layanan publik bisa terganggu jika mitigasi bencana tidak tertata.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Tembalang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Pengembangan Smart District
   a. Dukungan Pemkot Semarang terhadap *Smart City* memberi peluang penerapan pelayanan publik berbasis digital di kecamatan.
   b. Potensi aplikasi terpadu untuk administrasi, pelaporan warga, dan informasi layanan.

2. Pertumbuhan Ekonomi Lokal
   a. Banyaknya kos, pusat kuliner, dan sektor jasa membuka potensi sinergi program pemberdayaan ekonomi.
   b. Kecamatan dapat memfasilitasi UMKM lewat pelatihan, promosi, dan izin usaha sederhana.

3. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi
   a. Keberadaan UNDIP, Polines, dan kampus lainnya memungkinkan kerja sama penelitian, magang, dan program pengabdian masyarakat.
   b. Potensi inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat berbasis riset.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
   a. Kesadaran warga terhadap pentingnya layanan publik dan teknologi meningkat, memudahkan transisi ke layanan online.
   b. Forum RW/RT dan karang taruna dapat dioptimalkan untuk sosialisasi dan pengawasan.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Tembalang Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah **"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan"**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Tembalang terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **"Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan"**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Adalah **"Akses dan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik perlu ditingkatkan"**.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam program kegiatan Kecamatan Tembalang

   Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif Lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan.

b. Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

   Perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Tembalang Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Tembalang;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Tembalang;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Tembalang Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Tembalang;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tembalang;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Tembalang;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Tembalang;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Tembalang;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Tembalang;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Tembalang;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Tembalang;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Tembalang;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Tembalang.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Tembalang	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan Tembalang
		Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tembalang
		Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keuangan Kecamatan Tembalang
2.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Tembalang	Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Tembalang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah social dengan instansi terkait
		Belum optimalnya kualitas pelayanan public Kecamatan Tembalang
		Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Tembalang
		Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum Masyarakat Kecamatan Tembalang
		Masih kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Tembalang
3.	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tembalang	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tembalang
		Belum optimalnya kualitas ide/gagasan Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Tembalang
		Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang
		Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi Masyarakat Kecamatan Tembalang

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

A. Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas Nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas Nasional tersebut, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif.”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur

konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang**

Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program *urban farming*, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip *livability*. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 **Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.**

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem *start-up* dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 **Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga

dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 **Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.**

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 **Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.**

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. *Smart City* dikembangkan dengan integrasi *big data* untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Tembalang mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif”** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan**

yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas."

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat" (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Tembalang mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat" (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran "Indeks Pelayanan Publik" (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran "Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang" (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan Indikator Sasaran "Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan" (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah" (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Tembalang mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Tembalang dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Peranan Kecamatan Tembalang dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

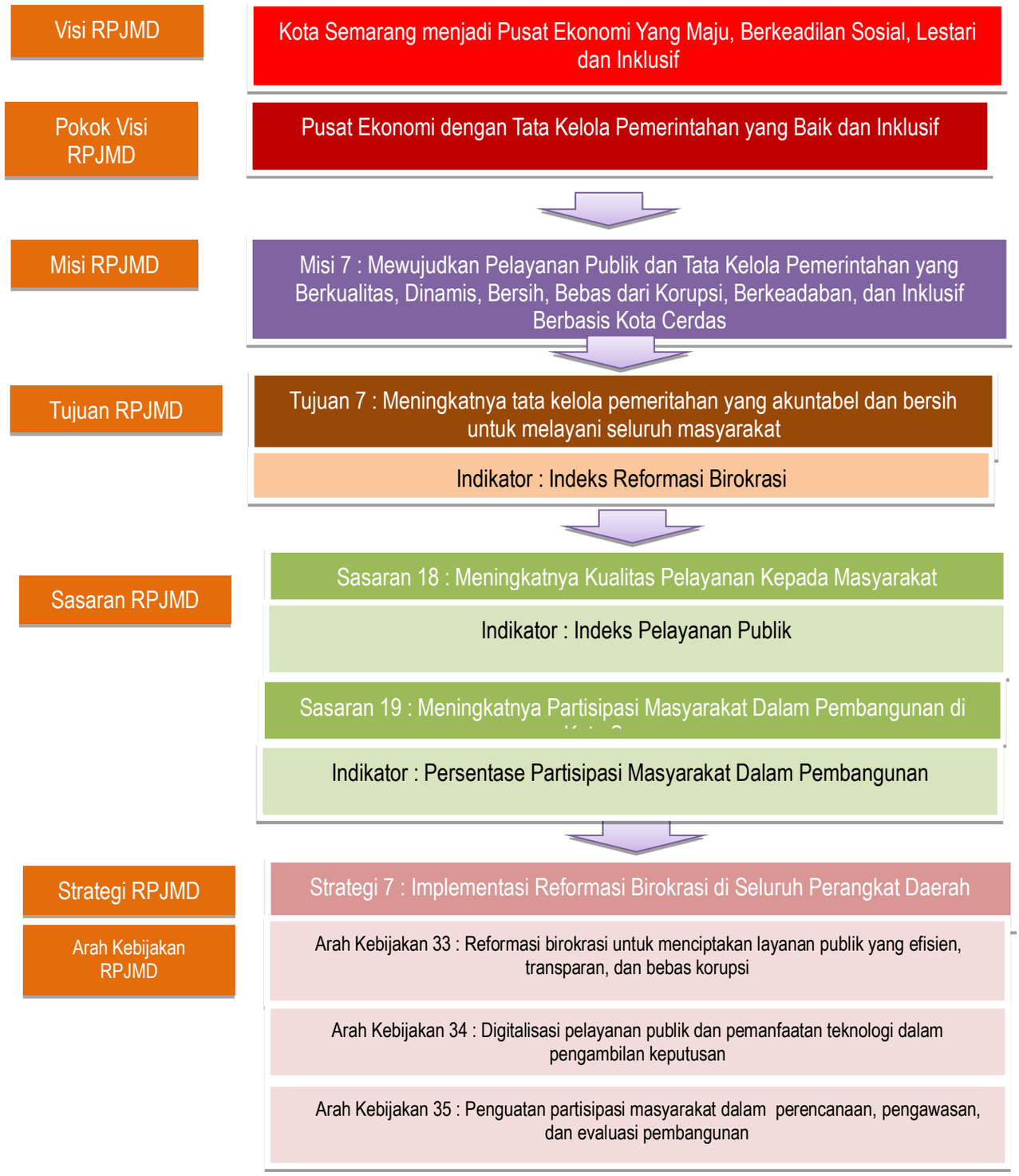

C. Telaahan Pengarusutamaan Gender

Kecamatan Tembalang sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan di bidang kewilayahan, telah mendukung pengarusutamaan gender. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Pada tahun 2022, Kecamatan Tembalang juga telah menunjukkan komitmen pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Pengarusutamaan Gender dengan menetapkan Tim Focal Point PUG Kecamatan Tembalang sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 900/18/VII/2022. Di tahun 2024 Kecamatan Tembalang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender, sebagaimana telah ditetapkan dalam Proba dan GBS.

Kecamatan Tembalang berkomitmen mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi instrument penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender (ARG) diproyeksikan sebagai instrument perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Implementasi ARG juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan public serta meningkatkan partisipasi aktif laki-laki perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.

D. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Kecamatan Tembalang tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian secara tidak langsung Kecamatan Tembalang berkaitan karena merupakan wilayah pelaksana beberapa kebijakan baik level Provinsi maupun level Nasional. Keterkaitan tersebut diantaranya dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1) Kota Layak Anak

   Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Semarang, Kecamatan Tembalang mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terhadap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA.

2) Kecamatan Berdaya

   Kecamatan Berdaya adalah program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) yang bertujuan memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan pemuda kreatif, dengan menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat, serta dunia usaha untuk pembangunan daerah. Program ini mengintegrasikan berbagai kegiatan, termasuk pelatihan ekonomi kreatif, perlindungan anak, fasilitasi disabilitas, dan penciptaan pusat-pusat kegiatan di tingkat kecamatan dan desa.

   Tujuan Utama Program Kecamatan Berdaya:

   - Memberdayakan Kelompok Rentan: fokus utama program ini adalah perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan anak muda kreatif.
   - Memperkuat Partisipasi Publik: mendorong partisipasi aktif perempuan, anak, disabilitas, dan pemuda dalam pembangunan.

- Pusat Pembangunan Berkelanjutan: mengembangkan kecamatan sebagai pusat kemajuan perekonomian, kreativitas, dan wadah aspirasi masyarakat.
- Layanan Publik Responsif: menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap masalah di masyarakat.

Elemen dan Kegiatan Program:

- Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA): fasilitas yang diisi oleh kader PKK dan Muslimat untuk mendukung perempuan dan anak.
- Pelatihan dan Pendampingan: memberikan pelatihan keterampilan seperti rumah kreatif untuk merintis usaha dan pola asuh keluarga.
- Keterlibatan Perguruan Tinggi: melibatkan perguruan tinggi, untuk memberikan dukungan melalui pelatihan, sosialisasi, dan program KKN.
- Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI): sinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melindungi dan melindungi produk lokal berbasis budaya.
- Posbankum: Pos Bantuan Hukum yang hadir di tingkat desa dan kelurahan untuk memberikan akses pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

3) Posyandu 6 SPM

Posyandu 6 SPM adalah pos pelayanan terpadu di kelurahan yang berfungsi mendukung pemenuhan enam standar pelayanan minimal pemerintah daerah, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman & ketertiban umum, serta sosial. Dengan demikian, Posyandu 6 SPM bukan hanya tempat layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi menjadi pusat layanan dasar multisektor di tingkat kelurahan. Posyandu ini menyediakan layanan edukasi, pendataan, pemantauan, serta fasilitasi masyarakat dalam enam bidang SPM, sesuai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin hak dasar warga negara.

4) Kerukunan dan Harmonisasi Wilayah

Selain kerukunan umat beragama, harmonisasi wilayah menjadi isu strategis yang harus terus dijaga. Kecamatan Tembalang sebagai kawasan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks menghadapi tantangan berupa potensi gesekan antarwarga, konflik kepentingan lahan, maupun perbedaan aspirasi pembangunan. Untuk itu, penguatan mekanisme mediasi, musyawarah, serta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan wilayah. Upaya harmonisasi ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun

2011–2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Dalam sistem pengembangan wilayah Kota, Kecamatan dikelompokkan dalam BWK yang meliputi:

a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Tembalang, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa berskala internasional;
   - pusat pemerintahan Provinsi; dan
   - pusat pemerintahan Kota.
b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pusat pendidikan kepolisian; dan
   - pusat olahraga
c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - transportasi laut;
   - transportasi udara; dan
   - kantor pelayanan pemerintahan Provinsi
d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk, dengan rencana pengembangan fungsi utama berupa industri.
e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - jasa pertemuan dan pameran.
f. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang, dengan rencana pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi.
g. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perkantoran militer; dan
   - perdagangan dan jasa.
h. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pendidikan tinggi; dan
   - paru-paru Kota.
i. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
   - paru-paru Kota.
j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - industri.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Tembalang masuk dalam wilayah VI, dengan rencana pengembangan fungsi utama Pendidikan tinggi. Sedangkan untuk rencana struktur ruang Kecamatan Tembalang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan, yaitu meliputi:
   - Pusat Pelayanan Kota
   - Sub Pusat Pelayanan Kota
   - Pusat Lingkungan

2. Sistem Jaringan Prasarana, yaitu meliputi:
   - Sistem Jaringan Transportasi
   - Sistem Jaringan Energi
   - Sistem Jaringan Telekomunikasi
   - Sistem Jaringan Sumber Daya Air
   - Infrastruktur Perkotaan

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Tembalang Adalah BWK VI dengan luas kurang lebih 4.420 hektar, dengan rencana pengembangan fungsi utama Pendidikan Tinggi.

Sedangkan rencana penetapan pusat pelayanan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota, berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Tembalang adalah Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Sendangmulyo.
3. Pusat Lingkungan, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di Kecamatan Tembalang yaitu:
   - Pusat Lingkungan 1 di Kelurahan Bulusan dengan daerah pelayanan Kelurahan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Kramas, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari;
   - Pusat Lingkungan 2 terdapat di Kelurahan Sendangmulyo dengan daerah pelayanan Kelurahan Kedungmundu;
   - Pusat Lingkungan 3 terdapat di Kelurahan Sambiroto dengan daerah pelayanan Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Tandang dan Kelurahan Jangli;

Selain itu, terdapat beberapa program utama pada Kecamatan Tembalang yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pembangunan jalan kota melalui jalan arteri sekunder UNDIP Tembalang – Kramas – Jalan Mulawarman Raya. Dan pada jalan kolektor sekunder UNDIP Tembalang – Jangli – Mrican;
2. Peningkatan dan Pembangunan persimpangan dan jembatan. Meliputi persimpangan sebidang rencana jalan tembus Tembalang-Jangli;
3. Pembangunan dan peningkatan terminal. Pengembangan terminal penumpang tipe C di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang;

4. Dalam rencana pengembangan system jaringan energi, yaitu peningkatan dan pengembangan jaringan SUTT pada Kecamatan Tembalang;
5. Sistem jaringan Sumber Daya Air dalam pengendalian banjir, yaitu embung pada sub sistem drainase Sungai Babon meliputi embung Bulusan di Kelurahan Bulusan, embung UNDIP di Kelurahan Tembalang, embung Rowosari di Kelurahan Rowosari;
6. Dalam rencana prasarana air limbah, yaitu sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal pada Kecamatan Tembalang;
7. Kawasan budi daya melalui Kawasan wisata, yaitu pengembangan dan peningkatan wisata pertanian (Agrowisata) pada Kecamatan Tembalang;
8. Pada Kawasan pertanian, yaitu pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada Kecamatan Tembalang.

F. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Semarang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1) Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (4) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan masalah strategis "**Belum optimalnya pelayanan publik yang "Transparan dan Akuntabel**", dan isu strategis "**Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang**

baik, demokratis, dan bertanggungjawab", seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Tema isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Pilar	Masalah Strategis	Isu Strategis
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan *Good Governance*.

Dari ke tujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang adalah isu strategis ke tujuh, yaitu "Penyelenggaraan *Good Governance*". Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : "Standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang".

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tembalang, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tembalang, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Isu Perangkat Daerah
Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Tembalang	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Tembalang
		Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Tembalang						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang
		Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang						Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Tembalang

Sumber: Kecamatan Tembalang, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tembalang dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tembalang Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal "Reformasi Birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi"; "Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan"; "Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan".

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah "**Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel**", dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat terwujud **"Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif"**.

3.1. TUJUAN RENSTRA KECAMATAN TEMBALANG

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat terwujud **Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :

“Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yaitu :

1. **“Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Tembalang”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).

2. **“Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Tembalang”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

3.2. SASARAN RENSTRA KECAMATAN TEMBALANG

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Tembalang Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dimana Kecamatan Tembalang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Tembalang.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Tembalang maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang**

   Dengan indikator sasaran yaitu :

   1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tembalang**.

      Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
   2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tembalang**

      Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tembalang**

   Dengan indikator sasaran yaitu “**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tembalang**”.

   Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang terkait Pelayanan Publik, Ketenteraman dan

Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tembalang**".

   Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Tembalang melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Tembalang.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat												
	TUJUAN : **Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang**		**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tembalang**	**Angka**	**N/A**	**N/A**	**96,00**	**96,50**	**97,00**	**97,50**	**98,00**	
		SASARAN 1 : **Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tembalang**	**Angka**	**74,75**	**74,80**	**76,20**	**76,25**	**76,30**	**76,35**	**76,40**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tembalang	**Angka**	**88,35**	**89,00**	**96,63**	**96,64**	**96,65**	**96,66**	**96,67**	
		SASARAN 2 : **Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tembalang**	**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tembalang**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**90,00**	**92,00**	**94,00**	**96,00**	**98,00**	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang	**Angka**	**N/A**	**N/A**	**80,00**	**81,00**	**82,00**	**83,00**	**84,00**	
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang												
		SASARAN 3 : **Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan**	**Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang**	**Angka**	**N/A**	**N/A**	**80,00**	**81,00**	**82,00**	**83,00**	**84,00**	

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

3.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN TEMBALANG

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Tembalang Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.3.1. STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	**TAHAP II 2027**	**TAHAP III 2028**	**TAHAP IV 2029**	**TAHAP V 2030**
Sinkronisasi optimalisasi kualitas pelayanan internal daam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tembalang	Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tembalang	Penguatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tembalang	Percepatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tembalang	Perwujudan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayaan publik Kecamatan Tembalang

Sinkronisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang	Optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang	Penguatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang	Percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang	Perwujudan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang
Sinkronisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang	Optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang	Penguatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang	Percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang	Perwujudan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang

Sumber: Kecamatan Tembalang 2025

3.3.2. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Tembalang Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Tembalang

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

a. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Tembalang;
b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tembalang;
c. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Tembalang.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

a. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Tembalang;
b. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;

c. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Tembalang;
d. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Tembalang;
e. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Tembalang;
f. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Tembalang.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :
a. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang;
b. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Tembalang;
c. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang;
d. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Tembalang.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Tembalang	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tembalang	
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Tembalang	
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Tembalang	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Tembalang	

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keter angan
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Tembalang	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Tembalang	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Tembalang	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tembalang	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Tembalang	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Tembalang	

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Tembalang
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tembalang
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Tembalang
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan Kecamatan Tembalang	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Tembalang
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah dengan instansi terkait

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			3. peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Tembalang
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Tembalang
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum Kecamatan Tembalang
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			6. peningkatan pemahaman tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Tembalang
	3. Meningkatnya kualitas kinerja kemasyarakatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan Kecamatan Tembalang	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan Kecamatan Tembalang
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan dalam musrenbang Kecamatan Tembalang
			3. peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan Kecamatan Tembalang
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi Kecamatan Tembalang

Sumber: Kecamatan Tembalang 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tembalang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota SemarangTahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun *cascading* kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan**		**Camat**
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		S1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tembalang		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekcam

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tembalang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag PEK
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Kecamatan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Kecamatan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Kecamatan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag PEK

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Kecamatan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Kecamatan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Kecamatan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang		Sekcam
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Tembalang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Umpeg
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Kecamatan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Kecamatan
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umpeg

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Kecamatan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Kecamatan
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Kecamatan
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umpeg
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Tembalang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tembalang yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umpeg
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Kecamatan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Kecamatan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umpeg
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Kecamatan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Kecamatan
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Tembalang yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Reksos
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Instansi Vertikal Terkait			
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kasi Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kasi Pelayanan Publik Kecamatan dan Lurah
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Bulusan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Jangli

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Kedungmundu
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Kramas
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Mangunharjo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Meteseh
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Rowosari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Sambiroto
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Sendangguwo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Sendangmulyo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Tandang
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seklur dan Staf Kelurahan Tembalang
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kasi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pelaksanaan tugas kewenangan camat	Dilimpahkan kepada Camat	Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan dan Lurah
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Kecamatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Bulusan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Jangli
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Kedungmundu
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Kramas

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Mangunharjo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Meteseh
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Rowosari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Sambiroto
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Sendangguwo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Sendangmulyo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Tandang
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan dan Staf Kelurahan Tembalang
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantibum Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Kecamatan
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Pemerintahan Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang		S3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		Camat
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Musrenbang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kasi Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kasi Reksos Kecamatan dan Lurah
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Bulusan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Jangli
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Kedungmundu
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Kramas
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Mangunharjo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Meteseh
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Rowosari
				Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Sambiroto

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Sendangguwo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Sendangmulyo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Tandang
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Tembalang
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasi Pemerintahan, Kasi Reksos Kecamatan dan Lurah
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Kecamatan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Bulusan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Jangli
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Kedungmundu
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Kramas
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Mangunharjo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Meteseh
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Rowosari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Sambiroto
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Sendangguwo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Sendangmulyo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Tandang
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum, Kasi Reksos dan Staf Kelurahan Tembalang
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		Kasi Reksos Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Kecamatan
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kasi Reksos Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Kecamatan

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan**	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang**		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	**Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan**	**Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	**Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)**	**Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib**		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	**Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil**			
7.	**Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi**			
8.	**Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK**			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Tembalang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan *output* kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. *Outcome* program serta *output* kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator *outcome* program serta indikator *output* kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator *output* kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *outcome* program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan

pentahapan pencapaian target *outcome* program serta *output* kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATN TEMBALANG				**84.753.146.228**		**90.200.178.174**		**92.570.980.020**		**93.006.462.631**		**94.033.675.922**	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA				**22.501.971.261**		**24.055.751.959**		**25.099.908.740**		**25.534.063.647**		**26.558.145.162**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang	**Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**61.773.500**		**65.479.910**		**66.789.508**		**116.748.298**		**66.789.508**	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tembalang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan**	**N/A**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.998.900		2.118.834		2.161.211		52.120.000		2.161.211	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		6 Dokumen		4 Dokumen		
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.728.900		1.832.634		1.869.287		1.869.287		1.869.287	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.998.900		2.118.834		2.161.211		2.161.211		2.161.211	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.246.900		3.441.714		3.510.548		3.510.548		3.510.548	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.998.900		2.118.834		2.161.211		2.161.211		2.161.211	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				801.000		849.060		866.041		866.041		866.041	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		
X.XX.01.1.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		53.000.000		54.060.000		54.060.000		54.060.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**18.361.556.381**		**19.285.952.326**		**20.230.078.859**		**21.207.305.174**		**22.240.233.364**	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.727.847.781		18.614.221.210		19.544.913.121		20.522.139.436		21.548.226.873	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	101 Orang/Bulan		101 Orang/Bulan		101 Orang/Bulan		101 Orang/Bulan		101 Orang/Bulan		
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				632.700.000		670.662.000		684.075.240		684.075.240		690.915.992	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				336.200		356.372		363.499		363.499		363.499	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				336.200		356.372		363.499		363.499		363.499	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									KET
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				336.200		356.372		363.499		363.499		363.499	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang	**Persentase Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tembalang**	**N/A**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**21.801.000**		**23.109.060**		23.571.241		23.571.241		23.571.241	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang	**Nilai Layanan Kepegawaian Kecamatan Tembalang**	N/A	89 Angka		91 Angka		92 Angka		93 Angka		94 Angka		
X.XX.01.1.05. 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.801.000		1.909.060		1.947.241		1.947.241		1.947.241	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		
X.XX.01.1.05. 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		21.200.000		21.624.000		21.624.000		21.624.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	135 Orang		140 Orang		145 Orang		150 Orang		155 Orang		
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1.076.765.095**		**1.242.403.607**		**1.315.083.329**		**1.031.594.064**		**1.122.706.179**	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				95.000.000		105.050.000		107.151.000		107.151.000		107.151.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.920.535		13.695.767		13.969.682		13.969.682		13.969.682	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket		2 Paket		2 Paket		3 Paket		3 Paket		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				108.263.000		114.758.780		117.053.956		117.053.956		117.053.956	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				165.705.800		175.648.148		179.161.111		179.161.111		179.161.111	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				694.375.760		833.250.912		897.747.580		614.258.315		705.370.430	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**455.662.264**		**637.927.170**		**650.685.713**		**541.577.966**		**491.577.966**	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	**Persentase pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				455.662.264		637.927.170		650.685.713		541.577.966		491.577.966	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	7 Unit		8 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.689.546.000**		**1.790.918.760**		**1.826.737.135**		**1.826.737.135**		**1.826.737.135**	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Tembalang	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tembalang yang selesai ditindaklanjuti**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.000.000		200.340.000		204.346.800		204.346.800		204.346.800	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.500.546.000		1.590.578.760		1.622.390.335		1.622.390.335		1.622.390.335	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**834.867.021**		**1.009.961.126**		**986.962.954**		**786.529.769**		**786.529.769**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									KET
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang sesuai ketentuan**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				165.757.900		182.333.690		185.980.364		185.980.364		185.980.364	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit		28 Unit		28 Unit		28 Unit		28 Unit		
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				118.895.121		126.028.828		128.549.405		128.549.405		128.549.405	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	N/A	3 Unit		5 Unit		5 Unit		7 Unit		7 Unit		
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				550.214.000		701.598.608		672.433.185		472.000.000		472.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit		3 Unit		5 Unit		7 Unit		7 Unit		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**2.836.802.900**		**3.120.363.190**		**3.182.770.454**		**3.182.770.454**		**3.182.770.454**	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, dan responsif pada kebutuhan masyarakat	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Tembalang yang tepat waktu**	**96,62%**	**93,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**245.848.900**		**270.313.790**		**275.720.066**		**275.720.066**		**275.720.066**	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**N/A**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3.000.000		3.180.000		3.243.600		3.243.600		3.243.600	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				242.848.900		267.133.790		272.476.466		272.476.466		272.476.466	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				**1.543.438.000**		**1.697.781.800**		**1.731.737.436**		**1.731.737.436**		**1.731.737.436**	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				330.438.000		363.481.800		370.751.436		370.751.436	12 Laporan	370.751.436	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	Kelurahan Bulusan
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	Kelurahan Jangli
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	Keulrahan Kedungmundu
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	Kelurahan Kramas
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	12 Laporan	102.300.000	12 Laporan	104.346.000	12 Laporan	104.346.000	12 Laporan	104.346.000	Kelurahan Mangunharjo

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	115.000.000	12 Laporan	126.500.000	12 Laporan	129.030.000	12 Laporan	129.030.000	12 Laporan	129.030.000	Kelurahan Meteseh
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	106.000.000	12 Laporan	116.600.000	12 Laporan	118.932.000	12 Laporan	118.932.000	12 Laporan	118.932.000	Kelurahan Rowosari
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	104.000.000	12 Laporan	114.400.000	12 Laporan	116.688.000	12 Laporan	116.688.000	12 Laporan	116.688.000	Kelurahan Sambiroto
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	111.000.000	12 Laporan	122.100.000	12 Laporan	124.542.000	12 Laporan	124.542.000	12 Laporan	124.542.000	Kelurahan Sendangguwo
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	132.000.000	12 Laporan	134.640.000	12 Laporan	134.640.000	12 Laporan	134.640.000	Kelurahan Sendangmulyo
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	114.000.000	12 Laporan	125.400.000	12 Laporan	127.908.000	12 Laporan	127.908.000	12 Laporan	127.908.000	Kelurahan Tandang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	12 Laporan	100.980.000	Kelurahan Tembalang
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**1.047.516.000**		**1.152.267.600**		**1.175.312.952**		**1.175.312.952**		**1.175.312.952**	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				327.516.000		360.267.600		367.472.952		367.472.952		367.472.952	Kecamatan Tembalang
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	Kelurahan Bulusan
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	Kelurahan Jangli

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	Keulrahan Kedungmundu
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	Kelurahan Kramas
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	60.500.000	12 Laporan	61.710.000	12 Laporan	61.710.000	12 Laporan	61.710.000	Kelurahan Mangunharjo
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	77.000.000	12 Laporan	78.540.000	12 Laporan	78.540.000	12 Laporan	78.540.000	Kelurahan Meteseh
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	71.500.000	12 Laporan	72.930.000	12 Laporan	72.930.000	12 Laporan	72.930.000	Kelurahan Rowosari
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	71.500.000	12 Laporan	72.930.000	12 Laporan	72.930.000	12 Laporan	72.930.000	Kelurahan Sambiroto

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	77.000.000	12 Laporan	78.540.000	12 Laporan	78.540.000	12 Laporan	78.540.000	Kelurahan Sendanggu wo
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	82.500.000	12 Laporan	84.150.000	12 Laporan	84.150.000	12 Laporan	84.150.000	Kelurahan Sendangm ulyo
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	77.000.000	12 Laporan	78.540.000	12 Laporan	78.540.000	12 Laporan	78.540.000	Kelurahan Tandang
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	12 Laporan	56.100.000	Kelurahan Tembalang
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**59.257.400.000**		**62.850.484.000**		**64.107.493.680**		**64.107.493.680**		**64.107.493.680**	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatn Tembalang**	**99,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**1.760.600.000**		**1.886.116.000**		**1.923.838.320**		**1.923.838.320**		**1.923.838.320**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	**Jumlah laporan hasil musrenbang**	**N/A**	**13 Laporan**		**13 Laporan**		**13 Laporan**		**13 Laporan**		**13 Laporan**		
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				102.000.000		112.200.000		114.444.000		114.444.000		114.444.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**1.760.600.000**		**1.886.116.000**		**1.923.838.320**		**1.923.838.320**		**1.923.838.320**	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**305 Kegiatan**	**425 Kegiatan**		**425 Kegiatan**		**425 Kegiatan**		**425 Kegiatan**		**425 Kegiatan**		
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	395.000.000	6 Pokmas/Ormas	434.500.000	6 Pokmas/Ormas	443.190.000	6 Pokmas/Ormas	443.190.000	6 Pokmas/Ormas	443.190.000	Kecamatan Tembalang
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	87.800.000	6 Pokmas/Ormas	93.068.000	6 Pokmas/Ormas	94.929.360	6 Pokmas/Ormas	94.929.360	6 Pokmas/Ormas	94.929.360	Kelurahan Bulusan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	71.000.000	6 Pokmas/Ormas	75.260.000	6 Pokmas/Ormas	76.765.200	6 Pokmas/Ormas	76.765.200	6 Pokmas/Ormas	76.765.200	Kelurahan Jangli
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	87.800.000	6 Pokmas/Ormas	93.068.000	6 Pokmas/Ormas	94.929.360	6 Pokmas/Ormas	94.929.360	6 Pokmas/Ormas	94.929.360	Keulrahan Kedungmundu
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	71.000.000	6 Pokmas/Ormas	75.260.000	6 Pokmas/Ormas	76.765.200	6 Pokmas/Ormas	76.765.200	6 Pokmas/Ormas	76.765.200	Kelurahan Kramas
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	92.000.000	6 Pokmas/Ormas	97.520.000	6 Pokmas/Ormas	99.470.400	6 Pokmas/Ormas	99.470.400	6 Pokmas/Ormas	99.470.400	Kelurahan Mangunharjo
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	180.200.000	6 Pokmas/Ormas	191.012.000	6 Pokmas/Ormas	194.832.240	6 Pokmas/Ormas	194.832.240	6 Pokmas/Ormas	194.832.240	Kelurahan Meteseh
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	92.000.000	6 Pokmas/Ormas	97.520.000	6 Pokmas/Ormas	99.470.400	6 Pokmas/Ormas	99.470.400	6 Pokmas/Ormas	99.470.400	Kelurahan Rowosari
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	108.800.000	6 Pokmas/Ormas	115.328.000	6 Pokmas/Ormas	117.634.560	6 Pokmas/Ormas	117.634.560	6 Pokmas/Ormas	117.634.560	Kelurahan Sambiroto

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	92.000.000	6 Pokmas/Ormas	97.520.000	6 Pokmas/Ormas	99.470.400	6 Pokmas/Ormas	99.470.400	6 Pokmas/Ormas	99.470.400	Kelurahan Sendanggu wo
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	197.000.000	6 Pokmas/Ormas	208.820.000	6 Pokmas/Ormas	212.996.400	6 Pokmas/Ormas	212.996.400	6 Pokmas/Ormas	212.996.400	Kelurahan Sendangm ulyo
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	108.800.000	6 Pokmas/Ormas	115.328.000	6 Pokmas/Ormas	117.634.560	6 Pokmas/Ormas	117.634.560	6 Pokmas/Ormas	117.634.560	Kelurahan Tandang
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	75.200.000	6 Pokmas/Ormas	79.712.000	6 Pokmas/Ormas	81.306.240	6 Pokmas/Ormas	81.306.240	6 Pokmas/Ormas	81.306.240	Kelurahan Tembalang
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**57.496.800.000**		**60.964.368.000**		**62.183.655.360**		**62.183.655.360**		**62.183.655.360**	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya**	**9 Dokumen**	**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4 Lembaga	127.000.000	4 Lembaga	139.700.000	4 Lembaga	142.494.000	4 Lembaga	142.494.000	4 Lembaga	142.494.000	Kecamatan Tembalang
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	2.215.480.000	5 Lembaga	2.348.408.800	5 Lembaga	2.395.376.976	5 Lembaga	2.395.376.976	5 Lembaga	2.395.376.976	Kelurahan Bulusan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	2.080.000.000	5 Lembaga	2.204.800.000	5 Lembaga	2.248.896.000	5 Lembaga	2.248.896.000	5 Lembaga	2.248.896.000	Kelurahan Jangli
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	3.367.200.000	5 Lembaga	3.569.232.000	5 Lembaga	3.640.616.640	5 Lembaga	3.640.616.640	5 Lembaga	3.640.616.640	Keulrahan Kedungmundu
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	1.469.160.000	5 Lembaga	1.557.309.600	5 Lembaga	1.588.455.792	5 Lembaga	1.588.455.792	5 Lembaga	1.588.455.792	Kelurahan Kramas
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	3.928.200.000	5 Lembaga	4.163.892.000	5 Lembaga	4.247.169.840	5 Lembaga	4.247.169.840	5 Lembaga	4.247.169.840	Kelurahan Mangunharjo
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	9.746.000.000	5 Lembaga	10.330.760.000	5 Lembaga	10.537.375.200	5 Lembaga	10.537.375.200	5 Lembaga	10.537.375.200	Kelurahan Meteseh
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	2.786.440.000	5 Lembaga	2.953.626.400	5 Lembaga	3.012.698.928	5 Lembaga	3.012.698.928	5 Lembaga	3.012.698.928	Kelurahan Rowosari
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	4.804.120.000	5 Lembaga	5.092.367.200	5 Lembaga	5.194.214.544	5 Lembaga	5.194.214.544	5 Lembaga	5.194.214.544	Kelurahan Sambiroto
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	5.548.360.000	5 Lembaga	5.881.261.600	5 Lembaga	5.998.886.832	5 Lembaga	5.998.886.832	5 Lembaga	5.998.886.832	Kelurahan Sendangguwo
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	13.341.920.000	5 Lembaga	14.142.435.200	5 Lembaga	14.425.283.904	5 Lembaga	14.425.283.904	5 Lembaga	14.425.283.904	Kelurahan Sendangmulyo
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	5.945.000.000	5 Lembaga	6.301.700.000	5 Lembaga	6.427.734.000	5 Lembaga	6.427.734.000	5 Lembaga	6.427.734.000	Kelurahan Tandang
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	5 Lembaga	1.820.920.000	5 Lembaga	1.930.175.200	5 Lembaga	1.968.778.704	5 Lembaga	1.968.778.704	5 Lembaga	1.968.778.704	Kelurahan Tembalang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				11.000.000		12.100.000		12.342.000		12.342.000		12.342.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				306.000.000		336.600.000		343.332.000		343.332.000		343.332.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**60.257.991**		**66.633.023**		**69.407.734**		**69.917.409**		**71.119.626**	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang**	**N/A**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**60.257.991**		**66.633.023**		**69.407.734**		**69.917.409**		**71.119.626**	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**	**N/A**	**12 Kegiatan**		**12 Kegiatan**		**12 Kegiatan**		**12 Kegiatan**		**12 Kegiatan**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				60.257.991		66.633.023		69.407.734		69.917.409		71.119.626	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**96.714.076**		**106.946.002**		**111.399.413**		**112.217.441**		**114.147.000**	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang**	**28,80%**	**82,00%**		**84,00%**		**86,00%**		**88,00%**		**90,00%**		
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**96.714.076**		**106.946.002**		**111.399.413**		**112.217.441**		**114.147.000**	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				96.714.076		106.946.002		111.399.413		112.217.441		114.147.000	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 – 2030

Kode Rek	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp17.550.000,00	Rp26.750.000,00	Rp28.622.500,00	Rp30.626.075,00	Rp32.769.900,00	Rp35.063.793,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp17.550.000,00	Rp26.750.000,00	Rp28.622.500,00	Rp30.626.075,00	Rp32.769.900,00	Rp35.063.793,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp17.550.000,00	Rp26.750.000,00	Rp28.622.500,00	Rp30.626.075,00	Rp32.769.900,00	Rp35.063.793,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	Rp17.550.000,00	Rp26.750.000,00	Rp28.622.500,00	Rp30.626.075,00	Rp32.769.900,00	Rp35.063.793,00	

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tembalang
Tahun 2025 - 2030

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang								
Indikator: Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tembalang	Angka	N/A	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan								
Indikator S2 : Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	N/A	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan								
Indikator Sasaran S3 : Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Permasalahan belum optimalnya kualitas kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

47. KECAMATAN CANDISARI

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang maka Kecamatan Candisari wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus

melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kecamatan Candisari merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Semarang yang memiliki karakteristik unik sebagai kawasan perkotaan dengan perpaduan fungsi pemukiman, perdagangan, dan jasa. Secara geografis, Kecamatan Candisari terletak di bagian tengah Kota Semarang dengan topografi perbukitan dan dataran yang bervariasi, sehingga menjadikan wilayah ini memiliki panorama indah sekaligus tantangan dalam pengelolaan tata ruang. Kecamatan ini terdiri atas beberapa kelurahan dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, mencerminkan peran pentingnya sebagai kawasan penyangga aktivitas sosial ekonomi kota. Dari sisi sosial, masyarakat Candisari menunjukkan keragaman latar belakang yang tercermin dalam kehidupan sosial budaya yang harmonis. Ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum di wilayah ini cukup memadai untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Di sisi ekonomi, Candisari berkembang sebagai kawasan yang ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, serta usaha kecil menengah yang menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Selain itu, keberadaan sentra kuliner, pusat perbelanjaan, dan sektor kreatif turut memperkuat daya tarik wilayah ini.

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan H Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Periode Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Kecamatan Candisari, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Candisari Kota Semarang.

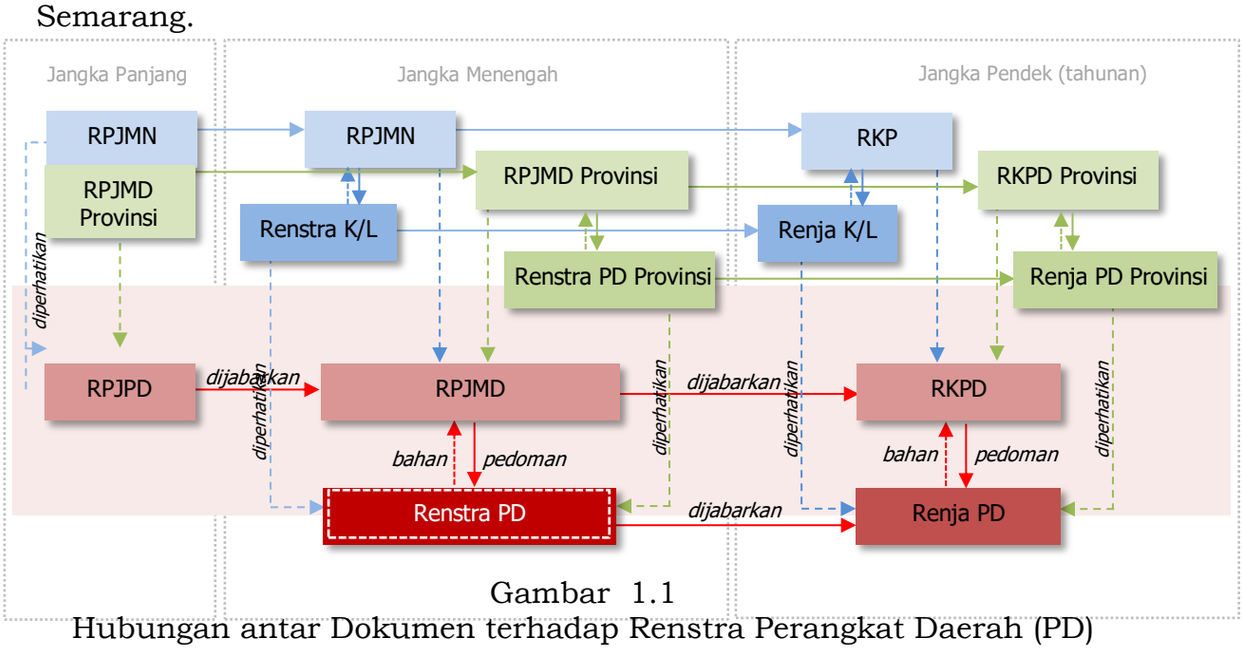

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Candisari adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Candisari adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya unsur kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Candisari, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Candisari. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Candisari yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Candisari yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Candisari mempunyai luas sebesar 654 Ha secara administratif terbagi dalam 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan Candisari dengan luas wilayah 6,54 km² termasuk dalam kategori kecamatan dengan luas wilayah kecil di Kota Semarang. Jika dibandingkan, kecamatan seperti Candisari (56,52 km²) dan Gunungpati (58,27 km²) memiliki luas hampir sepuluh kali lipat lebih besar. Kecamatan Candisari terletak di sisi timur wilayah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kecamatan Candisari
Sebelah Barat	:	Kecamatan Candisari
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Banyumanik
Sebelah Timur	:	Kecamatan Tembalang

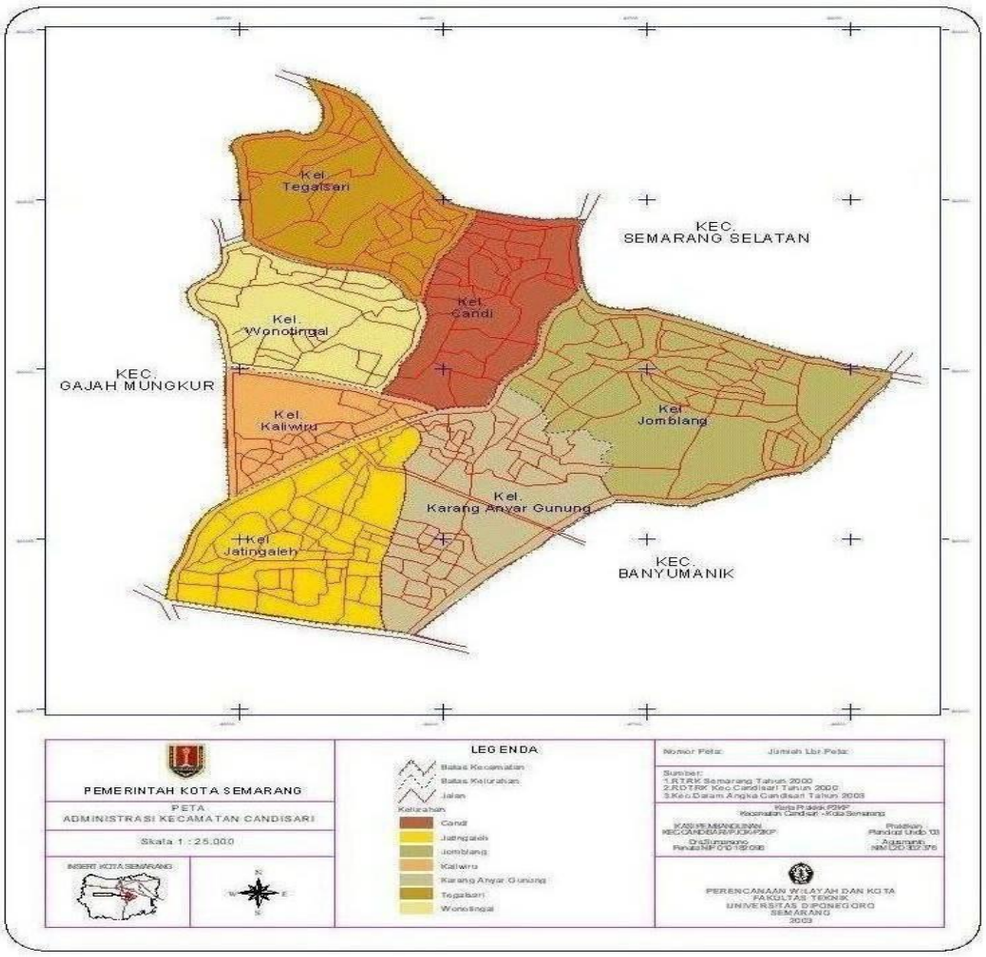

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Candisari bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; dimana disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusanpemerintahan umum sesuai penugasan Walikota;

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
7. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
8. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan;
9. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
10. melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
11. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
12. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat; dan
13. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Candisari Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

a) Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Sekretariat terdiri atas :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

d) Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

f) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

g) Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.

h) Jabatan Fungsional

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kelurahan

i) Lurah

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j) Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

k) Seksi Pembangunan Kelurahan

Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.

l) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.

m) Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Camat Candisari Kota Semarang.

Susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Kecamatan Candisari Kota Semarang dapat diihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Candisari Kota Semarang

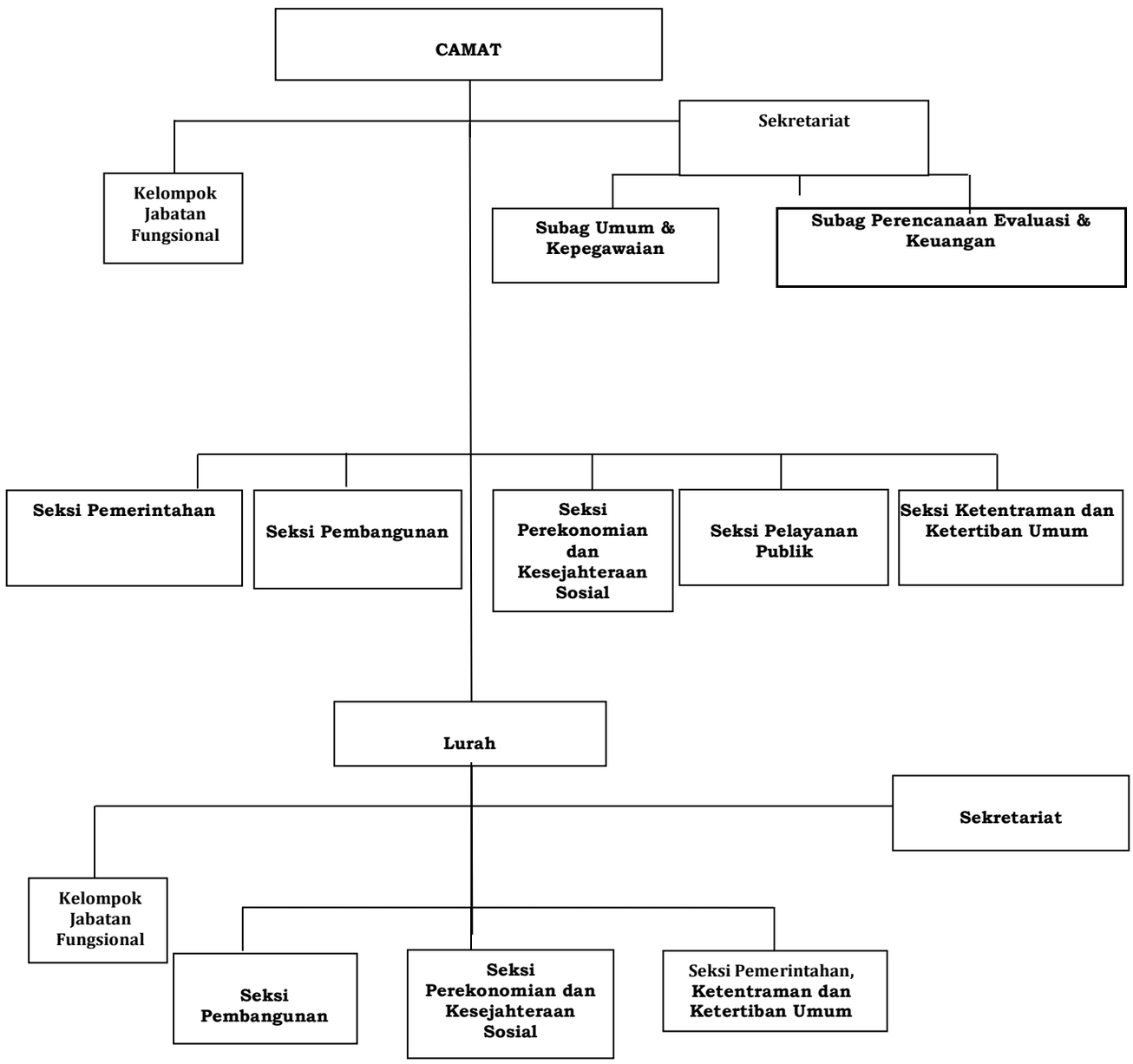

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Candisari

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Pada Kecamatan Candisari, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Candisari adalah sebagai berikut:

a. Camat

1) perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5) penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6) penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11) penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
15) penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16) penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
17) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
18) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

19) penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Candisari menyelenggarakan fungsi :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   d) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   e) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
   g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
   h) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
   b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
   d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:

a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

8) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
b) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
c) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
d) evaluasi Kelurahan.

9) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
a) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
b) Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
c) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
d) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
e) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
f) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

g) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
h) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
i) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
j) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
k) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
l) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
b) penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
c) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
d) pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan.

11) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
a) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
b) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
c) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
d) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
e) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

13) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
b) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
c) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

14) Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas

Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
7) pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
8) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
9) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
10) pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
11) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
12) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
13) pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
14) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
15) pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
16) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
17) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
18) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
19) pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
20) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
21) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;

22) pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;
23) pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
24) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
25) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
26) pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
27) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
28) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
29) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
30) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
6) menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
7) menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
10) menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
11) menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
13) menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;

14) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
17) menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
20) menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
22) menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
24) menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
25) menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
26) menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
27) menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
28) menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
29) menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
30) menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
32) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
34) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
35) menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;

36) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
37) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan; mm.menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
39) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
40) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
41) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
6) menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
9) menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
10) menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
11) menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16) menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
17) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
18) menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);

20) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
21) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
22) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
24) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
25) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
28) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
29) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
30) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
32) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
33) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
8) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
11) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi,

kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);

12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
13) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
14) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia; r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
20) menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
21) menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
22) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
23) menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
24) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
25) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
26) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
27) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
28) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
29) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
30) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
31) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
32) menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

33) menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
34) menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
35) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
36) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
37) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; mm.menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
39) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
40) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
41) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
42) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
6) menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
7) menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
8) menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
11) menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
12) menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
14) menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

15) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
16) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
17) menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
18) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
19) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
20) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
21) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
22) menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
24) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
26) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
27) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;

11) menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
20) menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
21) menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
25) menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
28) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
29) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
30) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan

32) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
34) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
35) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
37) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
38) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
39) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
40) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2) pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
9) pelaksanaan kegiatan koordinasi;
10) pelaksanaan kegiatan sekretariat;
11) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
12) pelaksanaan kegiatan pembangunan;
13) pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
14) pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
15) pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
16) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
17) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
18) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
19) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
20) pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
21) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
   3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   4) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   5) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
   2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
   3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
   4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
   1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
   3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   2) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   3) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   4) evaluasi Kelurahan;

i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
   1) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   2) peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   3) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   4) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   5) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
   6) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
   7) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
   8) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;

9) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
10) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
2) penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
3) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
4) Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
2) peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3) penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
4) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
5) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;

n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan

o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Candisari

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Aparatur Kecamatan Candisari Kota Semarang

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Candisari Kota Semarang pada Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 51 pegawai, dengan jumlah 49 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), yang terdiri dari 31 pegawai laki-laki (60,78%) dan 20 pegawai perempuan (39,22%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 43 pegawai, yang

terdiri dari 30 pegawai Non ASN laki-laki (69,77%) dan 13 pegawai Non ASN perempuan (20,23%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah sebanyak 94 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Kecamatan Candisari didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 26 orang (50,98%), S2 sebanyak 12 orang (23,53%), D3 sebanyak 11 orang (21,57%), dan lulusan SMA sebanyak 2 orang (3,92%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 6 Orang (13,95%) lulusan SMP, 11 Orang (25,58%) lulusan SMA, 2 Orang (4,65%) lulusan D3 dan sisanya sebanyak 24 orang (55,81%) merupakan lulusan S1.

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Candisari Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
1	SMP Sederajat	0	0	6	0	6
2	SMA Sederajat	2	0	11	0	13
3	D3	8	3	2	0	13
4	S1	16	10	11	13	50
5	S2	5	7	0	0	12
6	S3	0	0	0	0	0
Total		31	20	30	13	94

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Grafik 2.1
Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

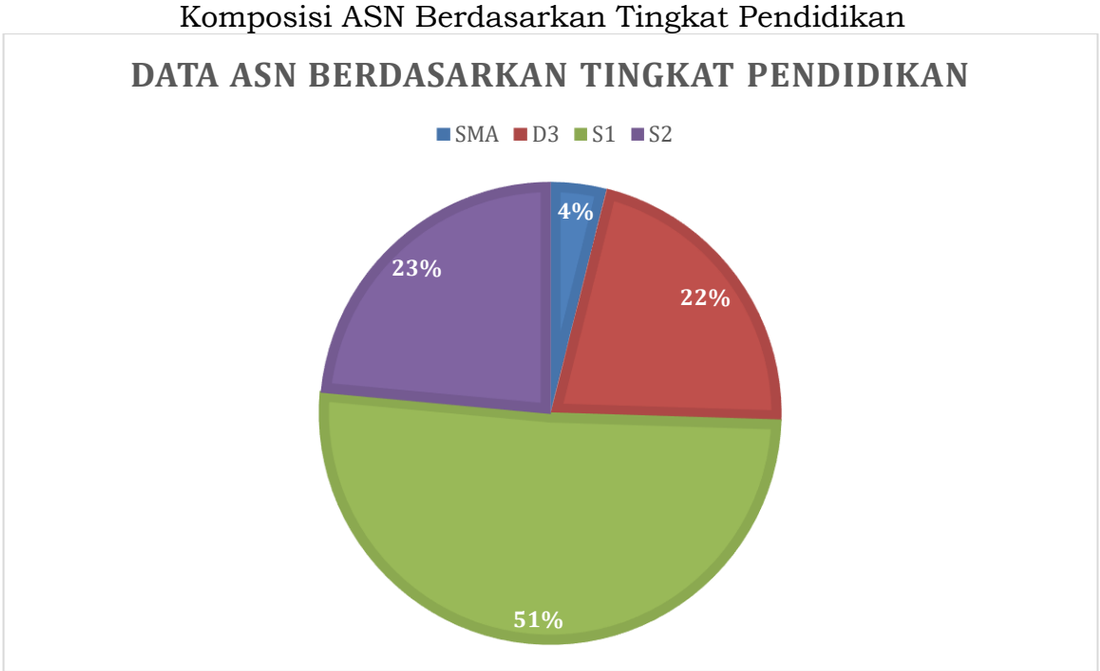

Sumber: Kecamatan Candisari Kota Semarang, per Desember 2024

Grafik 2.2
Komposisi Non-ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

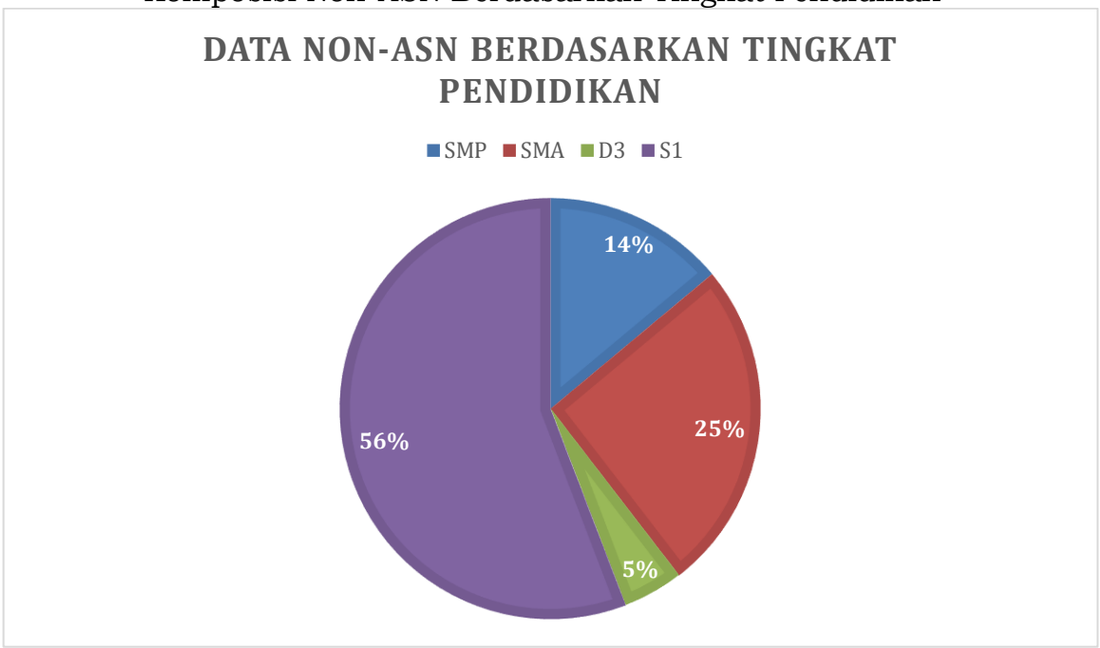

Sumber: Kecamatan Candisari Kota Semarang, per Desember 2024

Dari jumlah pegawai sebanyak 51 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Candisari Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	5	2	7
2	Golongan III	21	15	36
3	Golongan IV	4	2	6
4	Golongan VII	1	0	1
5	Golongan IX	1	0	1

Sumber: Kecamatan Candisari Kota Semarang, per Desember 2024

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan per Unit Kerja
di Kecamatan Candisari Tahun 2024

No	Kecamatan/Kelurahan	IX	VII	IV	III	II	I	JUMLAH	NON ASN
1	Kecamatan	1	1	2	7	3	-	**14**	**23**
2	Candi			1	4	-	-	**5**	**3**
3	Jatingaleh			1	4	1	-	**6**	**2**
4	Kaliwiru			1	4	-	-	**5**	**3**
5	Jomblang			-	5	1	-	**6**	**3**
6	Karanganyar Gunung			1	3	-	-	**4**	**3**
7	Tegalsari			-	5	1	-	**6**	**3**
8	Wonotingal			1	4	-	-	**5**	**3**
	Jumlah	**1**	**1**	**7**	**36**	**6**	**-**	**51**	**43**

Sumber: Kecamatan Candisari Kota Semarang, per Desember 2024

Berdasarkan Golongan, pegawai di lingkungan Kecamatan Candisari dengan Golongan III mempunyai jumlah yang paling banyak (36 orang), kemudian golongan II (6 orang) dan IV (7 orang) dan tambahan dua PPPK dengan golongan IX dan VII masing-masing 1 orang. Selain pegawai ASN, di wilayah Kecamatan Candisari juga terdapat pegawai non ASN yang bertugas sebagai Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Pengemudi, Pramu Bakti, Tenaga Pengelola IT dan Pengadministrasi Umum, Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi dan Pengolah Data Pelayanan.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Candisari berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Aset Tanah Kecamatan Candisari

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	185	1974	Jl. Tegalsari Perbalan RT. 7 Rw. III Kel. Wonotingal Kec.Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00026	Balai Pertemuan RW III	Pembelian	55.922,54	50.11.08.00
2.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	168	1974	Jl. Kawi I RT.07 RW.V Kel. Wonotingal Kec. Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00027	Balai Pertemuan Rw V & Rw VI	Pembelian	42.884,02	50.11.08.00
3.	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	209	1974	Jl.Ungaran III RT.04 RW.I Kel. Wonotingal Kec. Candisari	Hak Pakai	06/10/2011	HP 00033	Lapangan Bulu Tangkis RT.04 RW. I	Pembelian	295.220,40	50.11.08.00
4.	Tanah Lapangan Bola Volly	1.652	1974	Jl. Kagok II Rt. 8 Rw. V Kel. Wonotingal Kec. Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00025	Lapangan Olah Raga	Pembelian	386.465,58	50.11.08.00
5.	Tanah Lapangan Bola Volly	323	1974	Jl. Sisingamangaraja Rt. 2 Rw. I Kel. Wonotingal Kec. Candisari	Hak Pakai	06/10/2011	HP 00032	Lapangan Volly Rt.02 Rw. I	Pembelian	669.558,22	50.11.08.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
6.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.905,50	1993	Jl. Kesatrian No.18 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari	Hak Pakai	03/01/1993	10 HP 00104	Kantor, Balai dan Rumah Dinas	Pembelian	3.000.000,00	50.11.01.00 Kantor Kecamatan Candisari
7.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	500	1996	Lompo Batang No. 22 Kel. Kaliwiru Kec. Candisari	Hak Pakai		0 HP 00051	Kantor Kelurahan Kaliwiru	Pembelian	500.000	50.11.04.00
8.	Tanah Kaveling (dst)	65	2001	Jl. Jomblang Perbalan Rt. 1 Rw. I Kel. Candi Kec. Candisari	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Rumah Dinas Lurah Candi	Pembelian	18.000	50.11.02.00
9.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	220	2001	Jl. Jomblang Perbalan Rt. 1 Rw I Kel. Candi Kec. Candisar	Hak Pakai	20/04/2007	HP 00023	Kantor Kelurahan Candi	Pembelian	48.000	50.11.02.00
10.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	577	2001	Jl. Cinde No. 2 Kel. Jomblang Kec. Candisari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 00018	Kantor Kel Jomblang	Pembelian	5.000	50.11.05.00
11.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	450	2001	Jl. Jomblang Perbalan Rt. 1 Rw. I Kel. Candi Kec. Candisari	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Balai Pertemuan Kelurahan Candi	Pembelian	90.000	50.11.02.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
12.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	135	2001	Jl. Candi Losmen Kel. Candi Kec. Candisari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 00028	Balai Pertemuan	Pembelian	19.500	50.11.02.00
13.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	588	2001	Jl. Jomblang Barat IV Kel. Candi Kec. Candisari	Hak Pakai	03/04/2007	HP 26	Balai Pertemuan	Pembelian	70.000	50.11.02.00
14.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	177	2001	Jl. Tegalsari Sendang Kel. Candi Kec. Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00029	Balai Pertemuan	Pembelian	21.000	50.11.02.00
15.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	36	2001	Jl. Tegalsari Timur VIII Kel. Candi Kec. Candisari	Hak Pakai			Balai Pertemuan RT.01 RW. VI	Pembelian	720	50.11.02.00
16.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	45	2001	JL. Candisari I Kel. Candi Kec. Candisari	Hak Pakai			Balai Pertemuan RT.03 RW.VIII	Pembelian	900	50.11.02.00
17.	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	153	2001	Jl. Taman Tegalsari IV Kel. Candi Kec. Candisari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 00027	Lapangan Badminton	Pembelian	31.000	50.11.02.00
18.	Tanah Lapangan Parkir Konblok	190	2001	Jl. Tegalsari Sendang Kel. Candi	Hak Pakai		HP 00088	Lapangan Parkir	Pembelian	38.000	50.11.02.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Kec. Candisar							
19.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	470	2009	Jl. Jatingaleh III No. 391 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 00014	Balai Kelurahan Jatingaleh	Pembelian	1.316.200	50.11.03.00
20.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.375	2009	Jl. Karanganyar Gunung No.211 Rt. 5 Rw. III Kel. Karanganyar Gunung Kec. Candisari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 00028	Kantor, Balai, Rumah Dinas Kel Karanganyar Gunung	Pembelian	741.200	50.11.06.00
21.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	530	2009	Jl. Genuksari No. 1-C Rw. 04 Kel. Tegalsari Kec. Candisari	Hak Pakai	20/04/2007	HP 00019	Kantor dan Balai Kel Tegalsari	Pembelian	581.600	50.11.07.00
22.	Tanah Kaveling (dst)	680	2010	Jl. Tegalsari Barat I No.30 Rw. 13 Kel. Tegalsari Kec. Candisari	Hak Pakai	03/04/2007	HP 00023	Rumah Dinas	Pembelian	946.800	50.11.07.00
23.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	532	2010	Jl. Singgalang I/1 Kel.	Hak Pakai	20/04/2007	HP 0024	Kantor Kelurahan Wonotingal	Pembelian	1.886.800	50.11.08.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Wonotingal Kec. Candisari							
24.	Tanah Kaveling (dst)	210	2011	Jl. Kagok Rt. 8 Rw. V Kel. Wonotingal Kec. Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00028	Balai LPMK	Pembelian	1.357.600	50.11.08.00
25.	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	260	2011	Jl. Cinde Barat Rt. 5 Rw. V Kel. Jomblang Kec. Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00020	Bangunan TK Cinde Peni	Pembelian	416.000	50.11.05.00
26.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	107	2011	Jl. Cinde Barat Rt. 5 Rw. V Kel. Jomblang Kec. Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00023	Balai Pertemuan RW.V	Pembelian	171.000	50.11.05.00
27.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1.098	2011	Jl. Cinde Utara VI No. 2 Rt. 5 Rw. XII Kel. Jomblang Kec. Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00021	Balai Pertemuan RW. XII	Pembelian	1.400.000	50.11.05.00
28.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	764	2011	Jl. Jomblang Sari Kel. Jomblang Kec. Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00022	Balai Pertemuan RW.I & TK Cinde Peni	Pembelian	1.089.000	50.11.05.00
29.	Tanah Untuk Makam Umum	3.411	2011	Jl. Jangli Krajan II Rt. 2-3	Hak Pakai	04/07/2007	HP 00029	Tanah Makam Guntur	Pembelian	955.000	50.11.06.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Rw. VI Kel. Karanganyar Gunung Kec. Candisari							
30.	Tanah Untuk Makam Umum	3.122	2011	Jl. Jangli Tlawah Rt. 11 Rw. V Kel. Karanganyar Gunung Kec. Candisari	Hak Pakai	04/07/2007	HP 00030	Tanah Makam Gangsar	Pembelian	468.000	50.11.06.00
31.	Tanah Lapangan Taman lainnya	48	2011	Jl Cinde Raya Kel. Jomblang Kec. Candisari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 00016	Taman Rw. VI Kel. Jomblang	Pembelian	43.000	50.11.05.00
32.	Tanah Lapangan Taman lainnya	28	2011	Jl. Cinde Raya Kel. Jomblang Kec. Candisari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 00015	Taman	Pembelian	25.000	50.11.05.00
33.	Tanah Lapangan Taman lainnya	227	2011	Jl. Cinde Raya Kel. Jomblang Kec. Candisari	Hak Pakai	30/04/2007	HP 00017	Taman	Pembelian	204.000	50.11.05.00
34.	Tanah Lapangan Taman lainnya	705	2011	Jl. Cinde Raya Kel. Jomblang Kec. Candisari	Hak Pakai	07/08/2007	HP 00019	Taman dan Lapangan Rw VI	Pembelian	670.000	50.11.05.00
35.	Tanah Lapangan Taman lainnya	122	2011	Jl. Sriwijaya Rw. 13 Kel.	Hak Pakai	30/04/2007	HP 00021	Taman Tegalsari	Pembelian	153.000	50.11.07.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Tegalsari Kec. Candisari							
36.	Tanah Lapangan Taman lainnya	212	2011	Jl. Kendaliso do Rt. 1 Rw. I Kel. Wonotinga l Kec. Candisari	Hak Pakai	06/10/2 011	HP 00030	Taman	Pembelian	426.000	50.11.08.00
37.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	573	2012	Jl. Jatingaleh III No. 391 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari	Hak Pakai	30/04/2 007	HP 00015	Kantor Kelurahan dan Rumah Dinas	Pembelian	1.289.000	50.11.03.00
38.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	316	2012	Jl. Kagok Dalam II Rt. 5 Rw. VI Kel. Wonotinga l Kec. Candisari	Hak Pakai	06/10/2 011	HP 00031	Rumah Dinas Lurah Wonotingal	Pembelian	600.400	50.11.08.00
39.	Tanah Lapangan Tenis	1.874	2012	Jl. Tambora Rw. 10 Kel. Tegalsari Kec. Candisari	Hak Pakai	20/04/2 007	HP 00020	Lapangan Tenis	Pembelian	4.685.000	50.11.07.00
40.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	500	2024	Jalan Karangan yar Gunung RT 05 RW 04 Keluaraha n Karangan	Hak Pakai	29/11/2 021	HP 02165	Balai RW IV	Pembelian	1.088.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				yar Gunung Kecamatan Candisari							
41.	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	23	2024	Jalan Karangan yar Gunung RT 05 RW 05 Keluaraha n Karangan yar Gunung Kecamata n Candisari	Hak Pakai	23/11/2 021	HP 00160	Pos Satpam RT 5 RW V	Pembelian	187.335	
42.	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	1.134	2024	RT 10 RW 05 Kelurahan Karangan yar Gunung Kecamata n Candisari	Hak Pakai	23/11/2 021	HP 00161	Fasum Sendang RT.10 RW.05	Pembelian	2.467.584	
43.	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	724	2024	RT 02 RW 04 Kelurahan Karangan yar Gunung Kecamata n Candisari	Hak Pakai	12/10/2 021	HP 00162	Sumber air LKMD RW.03	Pembelian	4.926.820	

Tabel 2.5.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Candisari

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	Baik	96	Jl. Tegalsari Barat I No.30 RT.05 RW.XIII Semarang	96	Tanah Milik Pemda	Pembelian	537.554
2.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	Kurang Baik	260	Jl. Karanganyar Gunung No.211 Rt 05 Rw III Kel. Karanganyar Gunung Kec. Candisari	260	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.066.836,80
3.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik	405	Jl. Singgalang I No. 1 Kel. Wonotingal Kec. Candisari	405	Tanah Milik Pemda	Pembelian	832.926,23
4.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	195	Jl. Jatingaleh III No.391 Semarang	195	Tanah Milik Pemda	Pembelian	531.975,96
5.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	252	Jl. Jatingaleh III No. 391 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari	252	Tanah Milik Pemda	Pembelian	513.660,00
6.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	60	Jl.Kawi I RT. 07 RW.V	60	Tanah Milik Pemda	Pembelian	89.654
7.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	80	Jl. Cinde Dalam No.2 Semarang	80	Tanah Milik Pemda	Pembelian	128.950
8.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	54	Jl.Tegalsari PeRusak Beratalan	54	Tanah Milik Pemda	Pembelian	14.664
9.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	325	Jl.Karanganyar Gunung No.211 Semarang	325	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.109.275,56

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
10.	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Kurang Baik	45	Jl. Karanganyar Gunung No.211 Semarang	45	Tanah Milik Pemda	Pembelian	235.086
11.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	96	Jl. Tegalsari Barat I No.30 RT.05 RW.XIII Semarang	96	Tanah Milik Pemda	Pembelian	115.200
12.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	Kurang Baik	240	Jomblang PeRusak Beratalan Semarang	240	Tanah Milik Pemda	Pembelian	569.660,37
13.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	Baik	260	Jl. Cinde Dalam No.3 Semarang	260	Tanah Milik Pemda	Pembelian	922.446,80
14.	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	28	Jl. Cinde Dalam No.4 Semarang	28	Tanah Milik Pemda	Pembelian	33.600
15.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Kurang Baik	45	Jomblang PeRusak Beratalan Semarang	45	Tanah Milik Pemda	Pembelian	45.000
16.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	45	Jl. Kagok Semarang	45	Tanah Milik Pemda	Pembelian	34.452
17.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	70	Jl. Karanganyar Gunung No.211 Semarang	70	Tanah Milik Pemda	Pembelian	182.034
18.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	45	Jl. Jatingaleh III No.391 Semarang	45	Tanah Milik Pemda	Pembelian	44.500
19.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	128	Jl. Lompo Batang 22 Semarang	128	Tanah Milik Pemda	Pembelian	654.074
20.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	Kurang Baik	124	Tegalsari Sendang Semarang	124	Tanah Milik Pemda	Pembelian	151.400
21.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	Kurang Baik	40	Candisari I Semarang	40	Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.600

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
22.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	Kurang Baik	95	Candi Losmen Semarang	95	Tanah Milik Pemda	Pembelian	111.900
23.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	40	Jl. Lompo Batang 22 Semarang	40	Tanah Milik Pemda	Pembelian	81.728,68
24.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Baik	252	Jl. Jatingaleh III No. 391 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari	252	Tanah Milik Pemda	Pembelian	547.880
25.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	120	Jl Jomblang perbalan Kel Cand	120	Tanah Milik Pemda	Pembelian	271.485,65
26.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	125	Jl. Cinde Utara Rw VI Semarang	125	Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.120,77
27.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	635	Jl. Kesatrian No. 18, Jatingaleh	635	Tanah Milik Pemda	Pembelian	7.131.582,80
28.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	363	Kel. Jomblang	363	Tanah Milik Pemda	Pembelian	551.962,79
29.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	209	JL. Ungaran III Rt 04 Rw 01 Kel. Wonotingal Kec. Candisari	209	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.630

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Candisari

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Candisari.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Candisari

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Candisari berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan penunjang kewilayahan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Candisari
Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Indikator Tujuan**																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka			81	88	90	91	92	85.75	87.31	93.25	96.75	95.81	105.86%	99.22%	103.61%	106.32%	104.14%
2.	**Indikator Sasaran**																		
a.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka			-	-	1	1	1	-	-	1	8	1	-	-	100%	800%	100%
b.	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen			-	90	100	100	100	-	92.43	100	100	100	-	102.70%	100%	100%	100%
c.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen			80	95	97	98	99	100	100	100	100	100	125%	105.26%	103.09%	102.04%	101.01
d.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen			-	40	45	-	-	-	40	45	-	-	-	100%	100%	-	-
e.	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen			-	81.68	83.36	85.04	86.72	-	81.68	83.36	85.04	86.72	100%	100%	100%	100%	100%
f.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen			-	-	90	92	95	-	-	60	92	100	-	-	66.67%	100%	105.26%
g.	Nilai AKIP	Angka			-	74.53	75	75.5	76	-	68.96	71.06	76	76.55	-	92.53%	94.75%	100.66%	100.72%
3.	**Indikator Program**																		
	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persen			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persen					91	92	93			93.25	96.75	95.81			102.47%	105.16	103.02%
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen					100	100	100			100	100	100			100%	100%	100%
	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen					10	15	20			10	15	22.22			100%	100%	111.10%
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen					90	92	95			90	100	100			100%	108.69%	105.26%

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
		13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
3	Satuan kinerja	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun		

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun}} \times 100\%$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Candisari

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Candisari. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Candisari. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Candisari.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Candisari Kota Semarang

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.340.526.000	-	-	-	-	8.201.473.086	-	-	-	-	98.33	-	-	-	-	0	0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	417.534.400	-	-	-	-	414.882.018	-	-	-	-	99.36	-	-	-	-	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	251.140.000	-	-	-	-	250.197.500	-	-	-	-	99.62	-	-	-	-	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	509.547.600	-	-	-	-	508.903.200	-	-	-	-	99.87	-	-	-	-	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	224.455.000	-	-	-	-	224.455.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0	0
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	433.094.600	-	-	-	-	419.144.600	-	-	-	-	96.78	-	-	-	-	0	0
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	7.433.182.400	-	-	-	-	7.239.464.854	-	-	-	-	97.39	-	-	-	-	0	0
	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	620.235.000	-	-	-	-	620.235.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Program Pengelolaan Asset Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Program Peningkatan Intensifikasi PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	10.092.142.586	9.808.340.971	11.282.721.050	11.220.806.880	-	9.236.590.304	9.464.938.093	10.604.837.477	10.977.580.045	-	91.52	96,50	93,99	97,83	3,89	6,01
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	9.386.022.353	2.844.770.901	2.785.920.643	3.131.343.724	-	8.302.476.391	2.687.615.312	2.681.357.997	3.015.150.873	-	94,48	94,48	96,25	96,29	-19,79	-18,47

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	11.630.381.469	18.111.352.329	18.935.545.920	18.409.136.470	-	11.356.265.997	17.977.550.170	18.752.646.212	17.441.782.175	-	97.64	99,26	99,03	94,75	19,17	18,54
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	303.669.182	23.180.920	41.681.154	42.268.650	-	284.607.182	22.005.000	36.185.000	30.010.225	-	93,72	94,93	86,81	70,99	-3,72	-14,96
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	8.147.000	74.800.000	81.418.914	-	-	7.600.000	74.350.000	80.200.000	-	-	93,29	99,40	98,50	413,08	443,08

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang

c. Mitra Kecamatan Candisari dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah, Kecamatan Candisari Kota Semarang secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mitra Kecamatan Candisari terbagi dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

1. Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan

Sebagai mitra langsung di wilayah, kelurahan dan lembaga seperti RT/RW, LPMK, PKK, karang taruna, dan forum anak merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan di tingkat paling bawah. Mereka berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, mendukung pelaksanaan program pembangunan, dan menyampaikan informasi layanan secara cepat dan akurat.

2. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam)

Kecamatan Candisari menjalin sinergi dengan instansi vertikal seperti Polsek, Koramil, dan KUA dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan pelayanan lintas sektor.

3. Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan

Sekolah, puskesmas, rumah sakit, masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya menjadi mitra penting dalam pembinaan masyarakat, kampanye kesehatan, serta penguatan nilai-nilai sosial dan moral. Kerja sama dalam program edukasi, imunisasi, dan pemberdayaan remaja turut memperkuat peran kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

4. Pelaku Dunia Usaha dan UMKM

Dunia usaha, koperasi, dan pelaku UMKM lokal menjadi mitra dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Kecamatan berperan dalam memfasilitasi pelatihan, promosi produk, pengurusan perizinan, serta mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung pembangunan wilayah.

Melalui kemitraan yang solid dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, Kecamatan Candisari mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan menyeluruh. Kemitraan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi dalam mewujudkan Kecamatan Candisari yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Perangkat Daerah

1. *Hotline* Kecamatan Candisari
   Merupakan inovasi yang berbentuk media penerima aspirasi dan informasi bagi Masyarakat Candisari guna peningkatan pelayanan Publik di Kecamatan Candisari melalui aplikasi WhatsApp;
2. On the Spot Lansia
   Merupakan Pelayanan yang di berikan oleh Pemerintah Kecamatan Candisari kepada Masyarakat Candisari kategori Lansia dengan cara mendatangi Lansia untuk mendapatkan Pelayanan meliputi:
   - Pelayanan kesehatan

- Pelayanan kependudukan
- Kemiskinan

3. Nogosari (Nyowani Wargo Candisari)
   Merupakan Kegiatan Camat Candisari melakukan kunjungan ke warga Candisari dengan tujuan untuk menginventarisir permasalahan di masyarakat dan mencari solusinya.
4. SALIMAN (Satu Keluarga Lima Tanaman Pangan)
   Merupakan Program dam mendukung ketahanan pangan di masyarakat dimana satu keluarga diharuskan menanam 5 (lima) jenis tanaman pangan seperti (cabai, terong, tomat, sawi, dll) yang bertujuan untuk ketahanan pangan keluarga.
5. Resik Lingkungane Nyaman Wargane
   Merupakan Program yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Candisari berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Program ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu:
   - Melaksanakan Kerja Bakti Bersama Masyarakat Candisari
   - Melaksanakan Pilah Sampah di tingkat RT/ RW
6. FOKUS CANDISARI (Forum Khusus Usaha Masyarakat Candisari)
   Merupakan Forum yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi antara pelaku UMKM, membantu dalam pemasaran dan promosi produk UMKM, membangun jaringan yang kuat antara UMKM, pemerintah dan sector terkait. Memfasilitasi akses terhadap sumber daya dan peluang bisnis serta memberikan pelatihan dan pendampingan.
7. Gambas Seunting
   Merupakan Kegiatan Masyarakat candisari secara Bersama-sama memasak makanan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) untuk dibagikan kepada balita stunting di wilayah Kecamatan Candisari yang bertujuan untuk pencegahan stunting dan intervensi stunting.
8. Si Mak (Publikasi Masif Cegah Gratifikasi)
   Merupakan Gerakan Publikasi Masip untuk mencegah Gratifikasi di Kecamatan Candisari.
9. Jus Markisa (Jomblang berbagi Sayur Buah untuk Masyarakat Semakin Sehat)
   Merupakan Kegiatan Masyarakat Kelurahan Jomblang dengan cara berbagi Sayur dan buah secara geratis dengan tujuan untuk menekan Inflasi serta menggerakkan masyarakat gemar makan sayur dan buah.
10. Mandalika (Masyarakat Tanggap Dan Peduli Kaum Disabilitas)
    Merupakan Program khusus yang diberikan kepada setiap penyandang disabilitas untuk memiliki kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan yang lainnya.
11. Gerakan Sahabat Keluarga Peduli Stunting
    Kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui Dasa Wisma untuk mendampingi keluarga serta memberi kemudahan akses informasi dan dukungan terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting, terutama bagi keluarga yang rawan masalah Kesehatan dan balita stunting melalui media Buku KIA.

e. Penghargaan Perangkat Daerah

Tahun 2023, Kecamatan Candisari melalui Kelurahan Wonotingal memperoleh penghargaan Desa/Kelurahan Bebas Stunting Award 2023 dari ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia).

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Candisari dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Candisari sebagai berikut:

1) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Candisari;
2) Kesiapan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan publik berbasis digital;
3) Potensi konflik sosial, gangguan keamanan, gangguan ketenteraman dan ketertiban, serta bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Kecamatan Candisari;
4) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Candisari.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Candisari untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Peningkatan pemanfaatan teknologi, terutama media sosial sebagai sarana komunikasi publik, pengaduan, promosi inovasi, dan informasi terkait pelayanan publik;
2) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan pembangunan;
3) Generasi muda yang semakin melek teknologi memudahkan dalam adaptasi pelayanan publik berbasis digital.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Candisari.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Candisari diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Candisari telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Candisari.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang

adalah **“Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan”**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Candisari terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **“Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan”**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai berikut :

Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Dalam kurun waktu tahun 2022-2024, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional mengalami fluktuasi yaitu sebesar 60,00% pada Tahun 2022, 92% pada Tahun 2023; serta 100% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan serta sinergitas lintas sektor dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Candisari Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Candisari Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Candisari;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Candisari;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Candisari.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Candisari Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Candisari;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Candisari;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Candisari;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Candisari;

e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Candisari;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Candisari;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Candisari;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Candisari;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Candisari;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Candisari;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Candisari.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Candisari Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan Kecamatan Candisari Tahun 2025-2029

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
a.	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Candisari	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Candisari 2. belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Candisari 3. belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Candisari
b.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Candisari	1. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Candisari 2. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Candisari 4. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Candisari 5. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Candisari 6. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Candisari
c.	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Candisari	1. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Candisari 2. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Candisari

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		3. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari 4. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Candisari

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Kecamatan Candisari dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik di kecamatan yang menyebabkan kurang maksimalnya kualitas layanan dasar kepada masyarakat.
2. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur yang belum merata, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas, responsivitas, serta inovasi pelayanan.
3. Masih lemahnya mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, terutama dalam menangani masalah sosial, kebersihan, dan ketertiban umum.
4. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, baik dalam perencanaan pembangunan, pengawasan program, maupun pengembangan inisiatif pemberdayaan.
5. Minimnya pengembangan sistem informasi dan layanan digital yang dapat menunjang transparansi, efisiensi, dan jangkauan layanan masyarakat secara luas.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang sesuai dengan lingkunp perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dokumen RPJMN tersebut mengangkat sejumlah isu strategis nasional dan global yang harus direspons oleh seluruh pemangku kebijakan, termasuk pemerintah daerah hingga level kecamatan.

Beberapa isu strategis nasional dan global dalam RPJMN 2025–2029 yang relevan dengan lingkup tugas Kecamatan Candisari antara lain:

a. Isu Global yang Relevan
    1. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota
       Pertumbuhan penduduk di perkotaan semakin tinggi, sehingga menimbulkan tekanan terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, dan keterjangkauan layanan publik di tingkat lokal. Hal ini menuntut kecamatan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola wilayah urban secara inklusif dan efisien.

2. Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0
   Perubahan teknologi global menuntut kecamatan agar beradaptasi dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk sistem pelayanan terpadu, keterbukaan data, dan digitalisasi proses kerja.
3. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana
   Kecamatan harus responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan risiko bencana, termasuk dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir, dan pemberdayaan masyarakat tangguh bencana.

b. Isu Nasional yang Relevan
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   RPJMN menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan administratif harus melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan inovasi pelayanan.
2. Penguatan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Berbasis Wilayah
   Peran kecamatan diperkuat sebagai simpul koordinasi dan fasilitator pembangunan di wilayah kelurahan, termasuk penguatan peran Camat dalam integrasi program lintas OPD di level lokal.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
   Salah satu arah kebijakan RPJMN adalah penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Hal ini menuntut kecamatan untuk menjadi fasilitator yang efektif dalam musyawarah perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi multipihak.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM
   RPJMN juga menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan UMKM dan kewirausahaan lokal. Kecamatan diharapkan mendukung fasilitasi promosi, pelatihan, dan kemitraan UMKM di wilayah masing-masing.
5. Pengendalian Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah
   RPJMN mengarahkan upaya pengurangan kemiskinan berbasis wilayah. Kecamatan memiliki peran penting dalam pendataan masyarakat miskin, pengelolaan program bantuan sosial, dan mendorong program pemberdayaan yang menyasar kelompok rentan.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan,

masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.
Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.
Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 **Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada**
Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan,
Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk
mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang,
dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan

memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi

masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Candisari mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **"Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif"** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **"Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas."**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat" (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Candisari mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat" (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran "Indeks Pelayanan Publik" (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran "meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang" (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran "Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan" (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah" (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Candisari secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Candisari dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

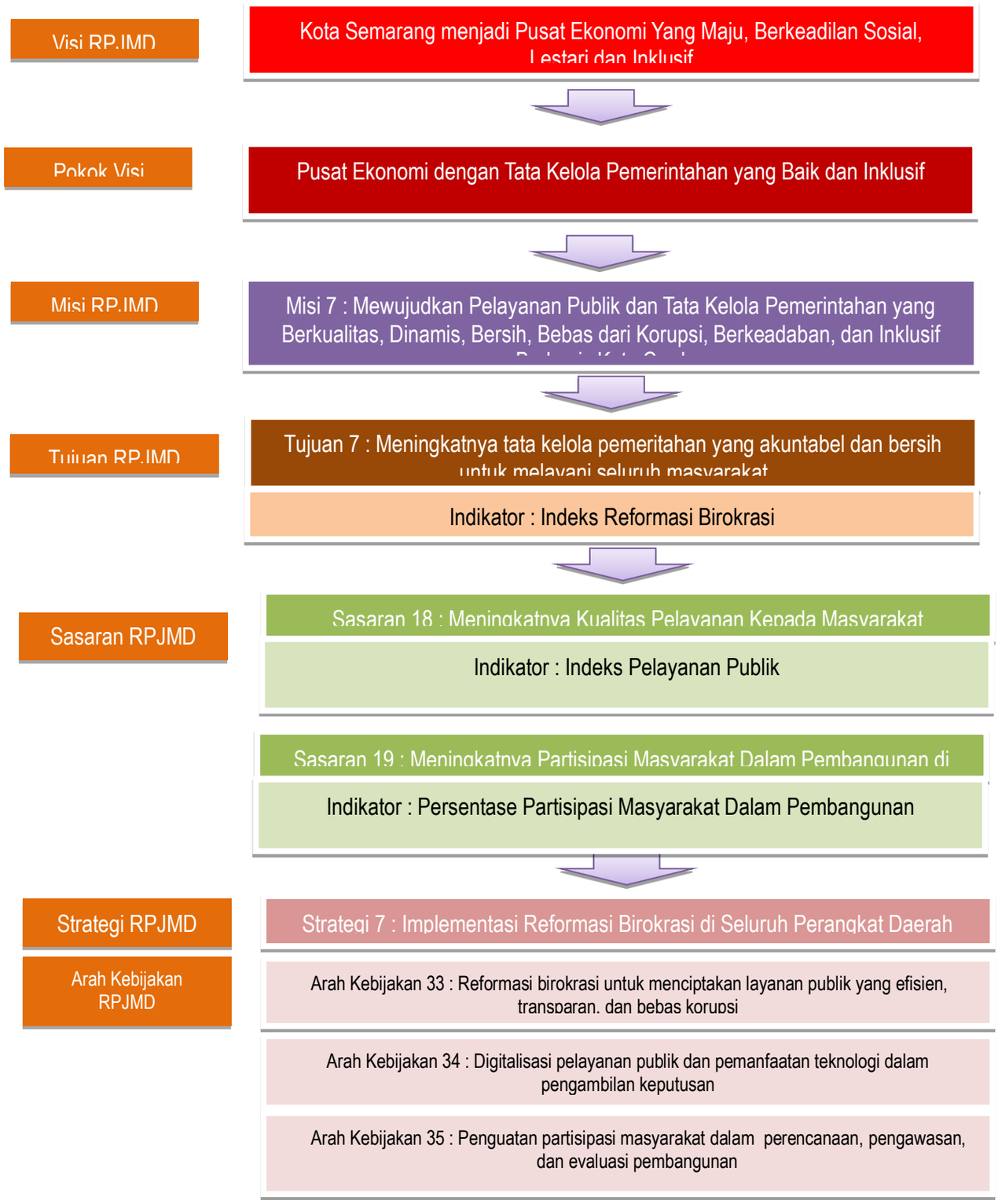

Gambar 2.2
Peranan Kecamatan Candisari dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, melalui optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan penguatan kapasitas aparatur;
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

3. Peningkatan daya saing ekonomi daerah, melalui pengembangan UMKM, penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi, serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan inklusif;
4. Penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penguatan peran masyarakat dalam pembangunan, dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel;
6. Pemantapan sinergi antarwilayah, antarperangkat daerah, dan antara pemerintah kota dengan stakeholder lainnya, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.

Kecamatan Candisari secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dalam mencapai indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, khususnya dalam:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, melalui penguatan peran Unit Pelayanan Terpadu (UPT) serta peningkatan responsivitas pelayanan administratif kepada warga;
2. Pemberdayaan ekonomi lokal, dengan mendorong pengembangan potensi wilayah seperti sentra industri kecil menengah, pertanian perkotaan, dan kawasan perdagangan;
3. Pelestarian lingkungan hidup, melalui kolaborasi program kampung iklim, penanganan sampah berbasis masyarakat, serta pengawasan pembangunan berbasis tata ruang;
4. Penguatan budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan pembangunan berbasis RW/Kelurahan yang sinergis dengan visi inklusifitas kota.
5. Kecamatan Candisari berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberi manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender (ARG) diproyeksikan sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Implementasi ARG juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.
6. Sebagai bagian dari Kota Semarang, Kecamatan Candisari mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terha dap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA.
7. Kecamatan Candisari diarahkan sebagai Kecamatan Berdaya yang mampu memperkuat tata kelola pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada optimalisasi potensi lokal, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui penguatan kapasitas aparatur serta kolaborasi multipihak,

kecamatan diharapkan menjadi simpul penggerak pembangunan partisipatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

8. Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat terus diperkuat untuk memenuhi 6 layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan. Kecamatan Candisari berupaya mendukung revitalisasi Posyandu agar lebih terintegrasi, inovatif, dan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan berkesinambungan.

9. Kerukunan umat beragama merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif. Kecamatan Candisari memiliki keragaman agama dan keyakinan yang tinggi, sehingga diperlukan penguatan dialog antarumat beragama, fasilitasi kegiatan keagamaan, dan dukungan terhadap forum-forum kerukunan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Upaya ini diarahkan untuk mencegah potensi konflik sosial, memperkuat kohesi sosial, dan membangun budaya toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
10. Selain kerukunan umat beragama, harmonisasi wilayah menjadi isu strategis yang harus terus dijaga. Kecamatan Candisari sebagai kawasan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks menghadapi tantangan berupa potensi gesekan antarwarga, konflik kepentingan lahan, maupun perbedaan aspirasi pembangunan. Untuk itu, penguatan mekanisme mediasi, musyawarah, serta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan wilayah. Upaya harmonisasi ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Dengan peran strategis tersebut, Kecamatan Candisari menjadi simpul penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Kota Semarang yang berorientasi pada pertumbuhan berkeadilan, keberlanjutan lingkungan, serta pelayanan publik yang semakin adaptif terhadap tantangan zaman.

c. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Kecamatan Candisari tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Kemajuan dari suatu wilayah tergantung dari bagaimana rencana yang telah ditetapkan dan bagaimana implementasinya. Hal ini akan menjadi tolok ukur wilayah tersebut untuk berkembang dan maju lebih baik. Berdasarkan RTRW Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 adapun rencana pola ruang untuk Kecamatan Candisari adalah: • Kecamatan Candisari masuk dalam BWK II yang mempunyai fungsi utama sebagai pusat pendidikan kepolisian dan pusat olahraga; • Terdapat 11 jenis pola ruang yang ada di Kecamatan Candisari dan luasan terbesar yaitu kawasan perumahan seluas 396,43 ha (59,96%), sedangkan luasan paling kecil yaitu kawasan ruang terbuka non hijau seluas 0,75 ha (0,11%). Untuk kawasan perumahan di Kecamatan Candisari dialokasikan untuk

perumahan kepadatan tinggi dengan rencana pengembangan peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.

Terkait dengan pola ruang wisata terdapat wisata budaya yaitu di Taman Budaya Raden Saleh dan rencana pengembangan dan peningkatan wisata mainan anak. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan sebaran pola ruang berdasarkan luasannya pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8.
Sebaran Pola Ruang di Kecamatan Candisari Berdasarkan Luasannya

No	Pola Ruang	Luas	
		(ha)	(%)
1	Kawasan Kesehatan	5,41	0,82
2	Kawasan Olahraga	2,82	0,43
3	Kawasan Pariwisata	7,21	1,09
4	Kawasan Pendidikan	14,69	2,22
5	Kawasan Perdagangan dan Jasa	150,16	22,71
6	Kawasan Peribadatan	3,15	0,48
7	Kawasan Perkantoran	9,06	1,37
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	25,26	3,82
9	Kawasan Perumahan	396,43	59,96
10	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	0,75	0,11
11	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	46,25	6,99

Sumber: RTRW Kota Semarang 2011-2031, diolah

Adapun mengenai struktur ruang terdapat beberapa rencana pengembangan yaitu:

• Perencanaan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Candisari akan dilewati jaringan pipa BBM Rewulu-Teras-Pengapon;

• Rencana pengembangan terkait sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) di Kecamatan Candisari yaitu sumur dangkal dan sumur pompa. Untuk sumur pompa dikendalikan dan hanya digunakan untuk pemenuhan air minum;

• Rencana jalur evakuasi bencana gerakan tanah berupa jalan-jalan yang aman dari bencana.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang melalui kebijakan penataan ruang Kota Semarang yaitu:

1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional;

2. Peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;

3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum;

4. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;

5. Pelestarian kawasan cagar budaya;

6. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota;
7. Pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
8. Pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;
9. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.
10. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
11. Pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; dan
12. Pengembangan kawasan strategis sosial budaya.

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa dalam dokumen yang mengandung unsur kebijakan, rencana dan program wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan KLHS RTRW Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 terdapat 9 isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas yaitu:

1. Adanya kejadian bencana alam dan perubahan iklim;
2. Meningkatnya ancaman sumber air baku;
3. Adanya kasus penyakit lingkungan;
4. Terjadinya degradasi tutupan lahan;
5. Masih adanya kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan;
6. Penurunan kualitas udara;
7. Belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga dan industri;
8. Belum optimalnya manajemen transportasi dan infrastuktur; dan
9. Belum optimalnya produksi, distribusi dan kualitas hasil pertanian.

Dari 9 isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas, maka diketahui akan berdampak pada Kebijakan Rencana Program (KRP) RTRW Kota Semarang 2011 – 2031. Berikut merupakan hasil KRP yang berpotensi terdampak:

1. Kebijakan Penataan Ruang meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
2. Rencana struktur ruang meliputi:
   a. Sistem jaringan transportasi darat yang didalamnya akan dikembangkan rencana (1) jalan lingkar (middle dan outer ring road), (2) jaringan jalur kereta api regional Semarang – Rembang melalui Kudus dan Semarang – Blora melalui jalur Demak, (3) pembangunan terminal tipe C, (4) jalan tol Semarang – Batang dan Semarang – Demak.

b. Sistem prasarana transportasi laut melalui rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang; dan

c. Sistem jaringan transportasi udara melalui rencana pengembangan Bandara Ahmad Yani.

3. Rencana Pola Ruang meliputi:

a. Kawasan perumahan baik kepadatan tinggi, sedang dan rendah;

b. Kawasan perdagangan dan jasa khususnya pusat perbelanjaan modern;

c. Kawasan perkantoran; dan

d. Kawasan industri.

4. Kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup dengan adanya pengembangan reklamasi laut untuk mengembalikan daratan pesisir Kota Semarang yang hilang.

Jika dilihat lebih rinci maka terdapat 3 rencana pola ruang di Kecamatan Candisari yang akan berpotensi terdampak yaitu kawasan perumahan kepadatan tinggi, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan perkantoran. Hal ini juga didukung dengan hasil analisis kemampuan lahan pada dokumen KLHS RTRW Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 bahwa Kecamatan Candisari mayoritas sebesar 58,51% masuk dalam Kemampuan Lahan Kelas IV yang sesuai untuk kawasan budidaya. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan Kecamatan Candisari yang masuk dalam kawasan rawan longsor menengah sampai tinggi, perhitungan terkait dengan Daya Dukung Lahan Bangunan Permukiman masuk kategori "terlampaui", dan Daya Dukung Lindung masuk dalam kategori "sangat rendah". Selanjutnya jika dilihat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 terdapat beberapa gambaran kondisi lingkungan di Kecamatan Candisari masuk dalam beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Terdapat penurunan tanah 0 – 1 cm = 3.185,77 m2;
2. Kelurahan Jomblang masuk dalam rawan bencana banjir;
3. Kelurahan Jomblang, Candi, Wonotingal masuk dalam Rawan Bencana Kekeringan;
4. Mayoritas masuk dalam kawasan rawan gerakan tanah "rendah" (48,93%); dan
5. Mayoritas masuk dalam kawasan rawan longsor "sangat tinggi" (51,48%).

Jika dilihat berdasarkan gambaran analisis lingkungan hidup terkait dengan kondisi Daya Dukung Air masuk dalam kategori "Terlampaui" yaitu sebesar 99,61%, sedangkan untuk Daya Dukung Pangan masuk juga dalam kategori "Terlampaui" yaitu sebesar 100%. Berdasarkan analisis jasa lingkungan hidup terdapat kecenderungan perubahan 1 jasa lingkungan hidup yaitu jasa lingkungan hidup penyedia pangan yang cenderung turun. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan perubahan indeks jasa lingkungan hidup Kecamatan Candisari yaitu:

1. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan "Turun";
2. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air "Tetap";
3. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim "Tetap";

4. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air “Tetap”;

5. Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir “Tetap”; dan

6. Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Longsor “Tetap”.

Terkait dengan penyusunan isu strategis hasil rumusan skenario TPB, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta masukan dan saran yang disepakati dari konsultasi publik terdapat isu strategis yang dijabarkan dalam KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut: **1. Pilar Sosial:**

a. Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan;

b. Masih kurangnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah;

c. Masih kurangnya kualitas pendidikan yang mengikuti kemajuan jaman dan teknologi;

d. Masih kurangnya kualitas prasarana pendidikan;

e. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran penerapan pola hidup sehat;

f. Masih kurangnya kesetaraan gender; dan

g. Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dan perempuan.

2. Pilar Lingkungan:

a. Masih kurangnya ketahanan terhadap bencana;

b. Belum optimalnya pengelolaan terhadap sumber air baku dan pelayanan air bersih yang aman dan layak untuk semua;

c. Masih kurangnya dukungan prasarana sanitasi dan limbah yang mendukung keberlanjutan lingkungan;

d. Masih kurangnya dukungan terhadap energi alternatif berkelanjutan;

e. Masih kurangnya dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan ruang terbuka hijau (RTH);

f. Masih kurangnya dukungan industri hijau; dan

g. Masih kurangnya dukungan terhadap transportasi publik berkelanjutan.

3. Pilar Ekonomi:

a. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan;

b. Masih kurangnya kontribusi sektor terhadap kesejahteraan;

c. Belum optimalnya dukungan sektor keuangan; dan

d. Belum optimalnya penerimaan pemerintah.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola:

a. Belum optimalnya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat;

b. Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel; dan

c. Belum optimalnya pelayanan aksesibilitas pita lebar.

Selanjutnya berikut ini merupakan perumusan isu strategis KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 yang dirumuskan berdasarkan TPB, skenario daya dukung, daya tampung, dan konsultasi publik adalah sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

   kualitas pendidikan dan kesehatan;

2. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender;

3. Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap

   keberlanjutan ekonomi daerah;

4. Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim;

5. Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi;

6. Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan

7. Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Tabel 2.9.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Candisari Kota Semarang

Pilar	Masalah Strategis	Isu Strategis
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Candisari

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari adalah isu strategis ke tujuh, yaitu "Penyelenggaraan Good Governance". Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : "standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang".

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Candisari, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Candisari, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Isu Strategis Kecamatan Candisari
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Candisari	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Candisari
		belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Candisari						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Candisari
		belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Candisari						peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Candisari

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Kecamatan Candisari sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Candisari dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Candisari Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal "Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi"; "Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan"; "Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan".

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah "**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**", dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.**

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat												
	TUJUAN : **Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Candisari**		**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Candisari**	**Angka**			**95,18**	**95,23**	**95,28**	**95,33**	**95,38**	
		SASARAN 1 : **Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Candisari**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Candisari**	**Angka**	**76,55**	**76,50**	**76,57**	**76,58**	**76,59**	**76,60**	**76,61**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Candisari	**Angka**	**95,81**	**95,81**	**95,82**	**95,83**	**95,84**	**95,85**	**95,86**	
		SASARAN 2 : **Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Candisari**	**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Candisari**	**Persen**			**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Candisari	**Angka**			**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan												
		SASARAN 3 : **Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari**	**Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari**	**Angka**			**80**	**82**	**84**	**86**	**88**	

Sumber: Kecamatan Candisari 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Candisari untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Candisari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Candisari				**Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Candisari**		**Camat**
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		S1:Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Candisari			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Candisari		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Candisari		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Kecamatan
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari		Sekretaris Kecamatan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Candisari	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				aparatur Kecamatan Candisari			
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari yang selesai ditindaklanjuti	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Candisari			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Candisari		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Candisari yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Seksi Pemerintahan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayanan Publik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatingaleh	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Jatingaleh
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Jatingaleh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatingaleh)	Sekretaris dan Staf Kel. Jatingaleh
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonotingal	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Wonotingal
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Wonotingal	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonotingal)	Sekretaris dan Staf Kel. Kelurahan Wonotingal
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Candi	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Candi

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Candi	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Candi)	Sekretaris dan Staf Kel. Candi
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kaliwiru	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kaliwiru
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kaliwiru	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaliwiru)	Sekretaris dan Staf Kel. Kaliwiru
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jomblang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Jomblang
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Jomblang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jomblang)	Sekretaris dan Staf Kel. Jomblang

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karanganyar Gunung	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Karanganyar Gunung
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Karanganyar Gunung	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	Sekretaris dan Staf Kel. Karanganyar Gunung
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tegalsari	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Tegalsari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tegalsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tegalsari)	Sekretaris dan Staf Kel. Tegalsari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Candisari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pembangunan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatingaleh	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Jatingaleh
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Jatingaleh	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jatingaleh)	Sekretaris dan Staf Kel. Jatingaleh
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonotingal	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Wonotingal
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Wonotingal	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonotingal)	Sekretaris dan Staf Kel. Wonotingal
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Candi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Candi

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Candi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Candi)	Sekretaris dan Staf Kel. Candi
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kaliwiru	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kaliwiru
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kaliwiru	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kaliwiru)	Sekretaris dan Staf Kel. Kaliwiru
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jomblang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Jomblang
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Jomblang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jomblang)	Sekretaris dan Staf Kel. Jomblang
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karanganyar Gunung	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Karanganyar Gunung

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karanganyar Gunung	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	Sekretaris dan Staf Kel. Karanganyar Gunung
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tegalsari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tegalsari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tegalsari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tegalsari)	Sekretaris dan Staf Kel. Tegalsari
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang		S3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari		Camat
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Seksi Pembangunan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jatingaleh	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Jatingaleh
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatingaleh	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatingaleh)	Sekretaris dan Staf Kel. Jatingaleh
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonotingal	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Wonotingal
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonotingal	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonotingal)	Sekretaris dan Staf Kel. Wonotingal

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Candi	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Candi
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Candi	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Candi)	Sekretaris dan Staf Kel. Candi
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kaliwiru	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kaliwiru
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaliwiru	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaliwiru)	Sekretaris dan Staf Kel. Kaliwiru
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jomblang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Jomblang
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jomblang	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jomblang)	Sekretaris dan Staf Kel. Jomblang
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karanganyar Gunung	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Karanganyar Gunung
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	Sekretaris dan Staf Kel. Karanganyar Gunung

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Kelurahan Karanganyar Gunung		
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalsari	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tegalsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalsari	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tegalsari)	Sekretaris dan Staf Kel. Tegalsari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Jatingaleh	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Jatingaleh
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Jatingaleh	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatingaleh)	Sekretaris dan Staf Kel. Jatingaleh
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Wonotingal	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Wonotingal

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Wonotingal	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonotingal)	Sekretaris dan Staf Kel. Wonotingal
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Candi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Candi
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Candi	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Candi)	Sekretaris dan Staf Kel. Candi
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Candisari	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Candisari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Candisari	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Candisari)	Sekretaris dan Staf Kel. Candisari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Jomblang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Jomblang
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Jomblang	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jomblang)	Sekretaris dan Staf Kel. Jomblang
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Karanganyar Gunung	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Karanganyar Gunung

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Karanganyar Gunung	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	Sekretaris dan Staf Kel. Karanganyar Gunung
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Tegalsari	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tegalsari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Tegalsari	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tegalsari)	Sekretaris dan Staf Kel. Tegalsari
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan**	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari**		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	**Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan**	**Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	**Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)**	**Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib**		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	**Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil**			
7.	**Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi**			
8.	**Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK**			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Candisari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Candisari Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana

program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan
Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas**			**12.650.183.082**		**14.083.923.681**		**14.707.954.325**		**14.822.579.887**		**15.092.957.850**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas**	**100,00 %**	**100,00 %**	**12.650.183.082**	**100,00 %**	**14.083.923.681**	**100,00 %**	**14.707.954.325**	**100,00 %**	**14.822.579.887**	**100,00 %**	**15.092.957.850**	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	**96,00%**	**96,67%**		**97,00%**		**97,33%**		**97,67%**		**98,00%**		
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan**			**15.893.803**		**26.566.688**		**26.566.688**		**26.566.688**		**26.500.000**	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00 %**	**100,00 %**	**15.893.803**	**100,00 %**	**26.566.688**	**100,00 %**	**26.566.688**	**100,00 %**	**26.566.688**	**100,00 %**	**26.500.000**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		5.000.000		5.566.688	4 Dokumen	5.566.688	6 Dokumen	5.566.688	4 Dokumen	5.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.566.688	4 Dokumen	5.566.688	4 Dokumen	5.566.688	4 Dokumen	5.000.000	
7.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			768.750		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	768.750	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	
7.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			925.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	925.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	
7.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			1.146.210		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.146.210	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1.941.750		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.941.750	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	
7.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			1.112.093		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	5 Laporan	1.112.093	5 Laporan	5.000.000	5 Laporan	5.000.000	5 Laporan	5.000.000	5 Laporan	5.500.000	
7.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	
7.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan			11.672.630.112		12.288.137.744		12.878.069.592		13.497.497.969		14.147.897.701	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	100,00%	11.672.630.112	100,00%	12.288.137.744	100,00%	12.878.069.592	100,00%	13.497.497.969	100,00%	14.147.897.701	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)			11.236.923.084		11.798.762.998		12.388.694.846		13.008.123.223		13.658.522.955	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	52 Orang	69 Orang	11.236.923.084	69 Orang	11.798.762.998	69 Orang	12.388.694.846	69 Orang	13.008.123.223	69 Orang	13.658.522.955	
7.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			433.224.120		482.324.676		482.324.676		482.324.676		482.324.676	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	433.224.120	12 Dokumen	482.324.676	12 Dokumen	482.324.676	12 Dokumen	482.324.676	12 Dokumen	482.324.676	
7.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1.223.572		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1.223.572	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	
7.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			1.134.572		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Laporan	12 Laporan	1.134.572	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	4.500.000	
7.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			124.764		550.070		550.070		550.070		550.070	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	124.764	1 Dokumen	550.070	1 Dokumen	550.070	1 Dokumen	550.070	1 Dokumen	550.070	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari												
7.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Candisari			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Candisari	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Candisari		84 Angka	25.000.000	86 Angka	25.000.000	88 Angka	25.000.000	90 Angka	25.000.000	92 Angka	25.000.000	
7.01.01.1.05. 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	NA	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kepegawaian (Dokumen)												
7.01.01.1.05. 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	370	20.000.000	370	20.000.000	370	20.000.000	370	20.000.000	370	20.000.000	
7.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari**			**273.439.745**		**662.566.688**		**676.665.484**		**335.566.688**		**213.907.588**	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari**	**100,00%**	**100,00%**	**273.439.745**	**100,00%**	**662.566.688**	**100,00%**	**676.665.484**	**100,00%**	**335.566.688**	**100,00%**	**213.907.588**	
7.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			25.915.853		35.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12 Paket	25.915.853	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	40.000.000	
7.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			5.000.000		5.566.688		5.566.688		5.566.688		6.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10 Paket	8 Paket	15,000,000	8 Paket	25,000,000	8 Paket	26,250,000	8 Paket	27,562,500	8 Paket	28,940,625	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			40.950.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		70.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	40.950.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	70.500.000	
7.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			44.644.505		65.000.000		65.000.000		65.000.000		45.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	44.644.505	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	45.000.000	
7.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			156.929.387		482.000.000		491.098.796		150.000.000		52.407.588	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5 Dokumen	156.929.387	5 Dokumen	482.000.000	5 Dokumen	491.098.796	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	52.407.588	
7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari**			**57.892.107**		**382.000.000**		**392.000.000**		**228.295.981**		**50.000.000**	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari**	**100,00%**	**100,00%**	**57.892.107**	**100,00%**	**382.000.000**	**100,00%**	**392.000.000**	**100,00%**	**228.295.981**	**100,00%**	**50.000.000**	
7.01.01.1.07.0006 Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			57.892.107		382.000.000		392.000.000		228.295.981		50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	16 Unit	57.892.107	18 Unit	382.000.000	20 Unit	392.000.000	22 Unit	228.295.981	24 Unit	50.000.000	
7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari yang selesai ditindaklanjuti**			**170.456.936**		**209.652.561**		**219.652.561**		**219.652.561**		**209.652.561**	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari yang selesai ditindaklanjuti**	**100,00%**	**100,00%**	**170.456.936**	**100,00%**	**209.652.561**	**100,00%**	**219.652.561**	**100,00%**	**219.652.561**	**100,00%**	**209.652.561**	
7.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			107.471.954		119.652.561		119.652.561		119.652.561		119.652.561	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	107.471.954	12 Laporan	119.652.561	12 Laporan	119.652.561	12 Laporan	119.652.561	12 Laporan	119.652.561	
7.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			62.984.982		90.000.000		100.000.000		100.000.000		90.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	62.984.982	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	90.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari sesuai ketentuan**			**434.870.380**		**490.000.000**		**490.000.000**		**490.000.000**		**420.000.000**	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari sesuai ketentuan**	**100,00%**	**100,00%**	**434.870.380**	**100,00%**	**490.000.000**	**100,00%**	**490.000.000**	**100,00%**	**490.000.000**	**100,00%**	**420.000.000**	
7.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			209.870.380		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	32 Unit	209.870.380	32 Unit	250.000.000	32 Unit	250.000.000	32 Unit	250.000.000	32 Unit	250.000.000	
7.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			35.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit	35.000.000	100 Unit	50.000.000	100 Unit	50.000.000	100 Unit	50.000.000	100 Unit	50.000.000	
7.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi			190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		120.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	190.000.000	3 Unit	190.000.000	3 Unit	190.000.000	3 Unit	190.000.000	3 Unit	120.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara /Direhabilitasi												
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan candisari yang tepat waktu**			**2.738.659.267**		**3.028.397.435**		**3.154.504.973**		**3.177.669.136**		**3.232.308.598**	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Candisari yang tepat waktu**	**100,00%**	**100,00%**	**2.738.659.267**	**100,00%**	**3.028.397.435**	**100,00%**	**3.154.504.973**	**100,00%**	**3.177.669.136**	**100,00%**	**3.232.308.598**	
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**100,00%**	**100,00%**	-	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**	-	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait**			**5.000.000**		**5.550.000**		**5.772.000**		**5.772.000**		**5.772.000**	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait**	**100,00%**	**100,00%**	**5.000.000**	**100,00%**	**5.550.000**	**100,00%**	**5.772.000**	**100,00%**	**5.772.000**	**100,00%**	**5.772.000**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.000.000		5.550.000		5.772.000		5.772.000		5.772.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.550.000	1 Laporan	5.772.000	1 Laporan	5.772.000	1 Laporan	5.772.000	
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**178.345.747**		**197.963.779**		**205.882.330**		**205.946.493**		**209.446.493**	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			178.345.747		197.963.779		205.882.330		205.946.493		209.446.493	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	178.345.747	12 Dokumen	197.963.779	12 Dokumen	205.882.330	12 Dokumen	205.946.493	12 Dokumen	209.446.493	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**790.552.205**		**865.998.596**		**900.638.540**		**923.738.540**		**934.238.540**	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Candisari	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100,00%**	**100,00%**	**790.552.205**	**100,00%**	**865.998.596**	**100,00%**	**900.638.540**	**100,00%**	**923.738.540**	**100,00%**	**934.238.540**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			247.702.205		273.235.096		284.164.500		284.164.500		287.664.500	Kecamatan Candisari

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	247.702.205	12 Laporan	273.235.096	12 Laporan	284.164.500	12 Laporan	284.164.500	12 Laporan	287.664.500	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			78.000.000		85.180.000		88.587.200		91.887.200		92.887.200	Kelurahan Candi
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000	12 Laporan	85.180.000	12 Laporan	88.587.200	12 Laporan	91.887.200	12 Laporan	92.887.200	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			76.550.000		83.570.500		86.913.320		90.213.320		91.213.320	Kelurahan Karanganyar Gunung
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	76.550.000	12 Laporan	83.570.500	12 Laporan	86.913.320	12 Laporan	90.213.320	12 Laporan	91.213.320	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			72.550.000		79.130.500		82.295.720		85.595.720		86.595.720	Kelurahan Kaliwiru
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	72.550.000	12 Laporan	79.130.500	12 Laporan	82.295.720	12 Laporan	85.595.720	12 Laporan	86.595.720	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			75.750.000		82.682.500		85.989.800		89.289.800		90.289.800	Kelurahan Wonotingal

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	75.750.000	12 Laporan	82.682.500	12 Laporan	85.989.800	12 Laporan	89.289.800	12 Laporan	90.289.800	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			82.750.000		90.452.500		94.070.600		97.370.600		98.370.600	Kelurahan Jombla ng
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	82.750.000	12 Laporan	90.452.500	12 Laporan	94.070.600	12 Laporan	97.370.600	12 Laporan	98.370.600	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			76.700.000		83.737.000		87.086.480		90.386.480		91.386.480	Kelurahan Jatingaleh
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	76.700.000	12 Laporan	83.737.000	12 Laporan	87.086.480	12 Laporan	90.386.480	12 Laporan	91.386.480	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			80.550.000		88.010.500		91.530.920		94.830.920		95.830.920	Kelurahan Tegalsari
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	80.550.000	12 Laporan	88.010.500	12 Laporan	91.530.920	12 Laporan	94.830.920	12 Laporan	95.830.920	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**1.764.761.315**		**1.958.485.060**		**2.042.212.103**		**2.042.212.103**		**2.082.851.565**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100,00%**	**100,00%**	**1.764.761.315**	**100,00%**	**1.958.485.060**	**100,00%**	**2.042.212.103**	**100,00%**	**2.042.212.103**	**100,00%**	**2.082.851.565**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1.624.761.315		1.803.485.060		1.867.212.103		1.867.212.103		1.872.851.565	**Kecamatan Candisari**
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1.624.761.315	12 Laporan	1.803.485.060	12 Laporan	1.867.212.103	12 Laporan	1.867.212.103	12 Laporan	1.872.851.565	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			20.000.000		22.200.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	Kelurahan Candi
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.200.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			20.000.000		22.200.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	Kelurahan Karanganyar Gunung
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.200.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			20.000.000		22.200.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	Kelurahan Kaliwiru
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.200.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			20.000.000		22.200.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	Kelurahan Wonotingal
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.200.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			20.000.000		22.200.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	Kelurahan Jombla ng
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.200.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			20.000.000		22.200.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	Kelurahan Jatingaleh

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.200.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			20.000.000		22.200.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	Kelurahan Tegalsari
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.200.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari**			**53.529.182**		**59.192.336**		**61.657.203**		**62.109.965**		**63.177.935**	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari**	**100,00%**	**100,00%**	**53.529.182**	**100,00%**	**59.192.336**	**100,00%**	**61.657.203**	**100,00%**	**62.109.965**	**100,00%**	**63.177.935**	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**			**53.529.182**		**59.192.336**		**61.657.203**		**62.109.965**		**63.177.935**	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**53.529.182**	**12 Kegiatan**	**59.192.336**	**12 Kegiatan**	**61.657.203**	**12 Kegiatan**	**62.109.965**	**12 Kegiatan**	**63.177.935**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			53.529.182		59.192.336		61.657.203		62.109.965		63.177.935	
Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	53.529.182	12 Laporan	59.192.336	12 Laporan	61.657.203	12 Laporan	62.109.965	12 Laporan	63.177.935	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari**			**74.468.834**		**82.347.311**		**85.776.391**		**86.406.264**		**87.892.005**	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada Tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari**	**80,00%**	**82,00%**	**74.468.834**	**82,00%**	**82.347.311**	**82,00%**	**85.776.391**	**82,00%**	**86.406.264**	**82,00%**	**87.892.005**	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**			**74.468.834**		**82.347.311**		**85.776.391**		**86.406.264**		**87.892.005**	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**74.468.834**	**2 Kegiatan**	**82.347.311**	**2 Kegiatan**	**85.776.391**	**2 Kegiatan**	**86.406.264**	**2 Kegiatan**	**87.892.005**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			74.468.834		82.347.311		85.776.391		86.406.264		87.892.005	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	74.468.834	100 Orang	82.347.311	100 Orang	85.776.391	100 Orang	86.406.264	100 Orang	87.892.005	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari**			**22.784.933.574**		**23.784.483.611**		**24.219.534.313**		**24.299.446.945**		**24.487.944.295**	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari**	**100,00%**	**100,00%**	**22.784.933.574**	**100,00%**	**23.784.483.611**	**100,00%**	**24.219.534.313**	**100,00%**	**24.299.446.945**	**100,00%**	**24.487.944.295**	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah laporan hasil musrenbang**			**25.000.000**		**40.134.840**		**45.031.290**		**45.000.000**		**45.000.000**	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	**Jumlah laporan hasil musrenbang**	**15 Laporan**	**15 Laporan**	**25.000.000**	**15 Laporan**	**40.134.840**	**15 Laporan**	**45.031.290**	**15 Laporan**	**45.000.000**	**15 Laporan**	**45.000.000**	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			25.000.000		40.134.840		45.031.290		45.000.000		45.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	4 Lembaga	6 Lembaga	25.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.134.840	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.031.290	6 Lembaga	45.000.000	6 Lembaga	45.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan						Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**451.500.000**		**542.728.865**		**578.455.578**		**655.255.578**		**752.321.851**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			85.000.000		88.728.865		97.566.378		107.166.378		127.232.651	Kecamatan Candisari
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/Ormas	85.000.000	4 Pokmas/Ormas	88.728.865	4 Pokmas/Ormas	97.566.378	4 Pokmas/ Ormas	107.166.378	4 Pokmas/ Ormas	127.232.651	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			57.500.000		70.000.000		73.542.000		83.142.000		94.142.000	Kelurahan Candi
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/Ormas	57.500.000	4 Pokmas/Ormas	70.000.000	4 Pokmas/Ormas	73.542.000	4 Pokmas/ Ormas	83.142.000	4 Pokmas/ Ormas	94.142.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			52.500.000		64.000.000		67.891.200		77.491.200		88.491.200	Kelurahan Karanganyar Gunung
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/Ormas	52.500.000	4 Pokmas/Ormas	64.000.000	4 Pokmas/Ormas	67.891.200	4 Pokmas/ Ormas	77.491.200	4 Pokmas/ Ormas	88.491.200	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			37.500.000		50.000.000		53.040.000		62.944.000		73.640.000	Kelurahan Kaliwiru
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/Ormas	37.500.000	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	4 Pokmas/Ormas	53.040.000	4 Pokmas/ Ormas	62.944.000	4 Pokmas/ Ormas	73.640.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			42.500.000		55.000.000		58.344.000		67.944.000		78.944.000	Kelurahan Wonotingal
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/Ormas	42.500.000	4 Pokmas/Ormas	55.000.000	4 Pokmas/Ormas	58.344.000	4 Pokmas/ Ormas	67.944.000	4 Pokmas/ Ormas	78.944.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			72.500.000		85.000.000		90.168.000		99.768.000		110.768.000	Kelurahan Jombang
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/Ormas	72.500.000	4 Pokmas/Ormas	85.000.000	4 Pokmas/Ormas	90.168.000	4 Pokmas/ Ormas	99.768.000	4 Pokmas/ Ormas	110.768.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			43.500.000		56.000.000		59.404.800		69.004.800		80.004.800	Kelurahan Jatingaleh

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/Ormas	43.500.000	4 Pokmas/Ormas	56.000.000	4 Pokmas/Ormas	59.404.800	4 Pokmas/ Ormas	69.004.800	4 Pokmas/ Ormas	80.004.800	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			60.500.000		74.000.000		78.499.200		88.099.200		99.099.200	Kelurahan Tegalsari
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/Ormas	60.500.000	4 Pokmas/Ormas	74.000.000	4 Pokmas/Ormas	78.499.200	4 Pokmas/ Ormas	88.099.200	4 Pokmas/ Ormas	99.099.200	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya**			**22.294.619.906**		**23.176.619.906**		**23.570.622.444**		**23.570.622.444**		**23.658.622.444**	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya**	**18 Dokumen**	**4 Dokumen**	**22.294.619.906**	**4 Dokumen**	**23.176.619.906**	**4 Dokumen**	**23.570.622.444**	**4 Dokumen**	**23.570.622.444**	**4 Dokumen**	**23.658.622.444**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			117.000.000		117.000.000		118.989.000		118.989.000		129.989.000	Kecamatan Candisari
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	117.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	117.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	118.989.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	118.989.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	129.989.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			3.330.770.000		3.431.770.000		3.490.110.090		3.490.110.090		3.501.110.090	Kelurahan Candi
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	6 Lembaga	3.330.770.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.431.770.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.490.110.090	6 Lembaga	3.490.110.090	6 Lembaga	3.501.110.090	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kemasyarakatan	Kemasyarakatan						Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			2.846.440.000		2.972.440.000		3.022.971.480		3.022.971.480		3.033.971.480	Kelurahan Karanganyar Gunung
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.846.440.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.972.440.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.022.971.480	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.022.971.480	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.033.971.480	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			1.180.985.440		1.306.985.440		1.329.204.192		1.329.204.192		1.340.204.192	Kelurahan Kaliwiru
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.180.985.440	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.306.985.440	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.329.204.192	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.329.204.192	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.340.204.192	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			2.236.460.000		2.362.460.000		2.402.621.820		2.402.621.820		2.413.621.820	Kelurahan Wonotingal
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.236.460.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.362.460.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.402.621.820	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.402.621.820	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.413.621.820	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			5.669.381.746		5.795.381.746		5.893.903.236		5.893.903.236		5.904.903.236	Kelurahan Jomblang
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.669.381.746	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.795.381.746	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.893.903.236	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.893.903.236	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.904.903.236	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			2.407.880.000		2.533.880.000		2.576.955.960		2.576.955.960		2.587.955.960	Kelurahan Jatingaleh

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.407.880.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.533.880.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.576.955.960	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.576.955.960	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.587.955.960	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			4.530.702.72		4.656.702.720		4.735.866.666		4.735.866.666		4.746.866.666	Kelurahan Tegalsari
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.530.702.72	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.656.702.720	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.735.866.666	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.735.866.666	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.746.866.666	
	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan			**3.813.668**		**5.000.000**		**5.085.000**		**6.000.000**		**7.000.000**	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			3.813.668		5.000.000		5.085.000		6.000.000		7.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		1 Lembaga Kemasyarakatan	3.813.668	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.085.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	
	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat			**10.000.000**		**20.000.000**		**20.340.000**		**22.568.923**		**25.000.000**	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			10.000.000		20.000.000		20.340.000		22.568.923		25.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	**Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**	2 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.340.000	1 Laporan	22.568.923	1 Laporan	25.000.000	

Dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2025-2029, Kecamatan turut berperan aktif dalam peningkatan PAD melalui retribusi penyewaan aset di kecamatan dan kelurahan. Berikut akan dijelaskan secara rinci untuk target pendapatan kecamatan Candisari.

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Kecamatan Candisari
Kota Semarang

Uraian Pendapatan Retribusi	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Retribusi Daerah	4.520.000	4.836.400	5.174.948	5.537.194	5.924.798	6.339.534	6.783.301	
Retribusi Jasa Usaha	4.520.000	4.836.400	5.174.948	5.537.194	5.924.798	6.339.534	6.783.301	
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.520.000	4.836.400	5.174.948	5.537.194	5.924.798	6.339.534	6.783.301	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Candisari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Candisari yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan : Meningkatkan Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Candisari									
	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Candisari	Angka	N/A	95,18	95,23	95,28	95,33	95,38	
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Candisari									
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Candisari	Angka	76,50	76,57	76,58	76,59	76,60	76,61	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	95,81	95,82	95,83	95,84	95,85	95,86	

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan									
	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	N/A	90	91	92	93	94	
	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan	Angka	N/A	80	81	82	83	84	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan									
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	N/A	80	82	84	86	88	

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Candisari Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Candisari Kota Semarang
Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat	%	96,46	97,02	97,58	98,14	98,7	99,26	
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	98,94	102,23	105,51	108,8	112,09	115,38	
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	98,61	101,34	104,06	106,78	109,5	112,23	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100,83	101,65	102,48	103,3	104,13	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Candisari Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan unsur penunjang kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Candisari Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Permasalahan belum optimalnya kualitas kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Candisari Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pemerintahan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Candisari Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

48. KECAMATAN BANYUMANIK

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang maka Kecamatan Banyumanik wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

25. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
26. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 37);
27. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah:

a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya unsur kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
c. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
d. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

II.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK

II.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Tugas dan Fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Banyumanik bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; dimana disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Banyumanik menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
i. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;

k. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
m. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
n. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Banyumanik telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a) Camat
Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.
Sekretariat terdiri atas :
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

d) Seksi Pembangunan
Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

f) Seksi Pelayanan Publik
Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

g) Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketrentaman dan Ketertiban Umum.

h) Jabatan Fungsional
Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kelurahan

a) Lurah
Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b) Sekretariat Kelurahan
Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

c) Seksi Pembangunan Kelurahan
Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.

d) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.

e) Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Camat Banyumanik Kota Semarang.

Susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dapat diihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

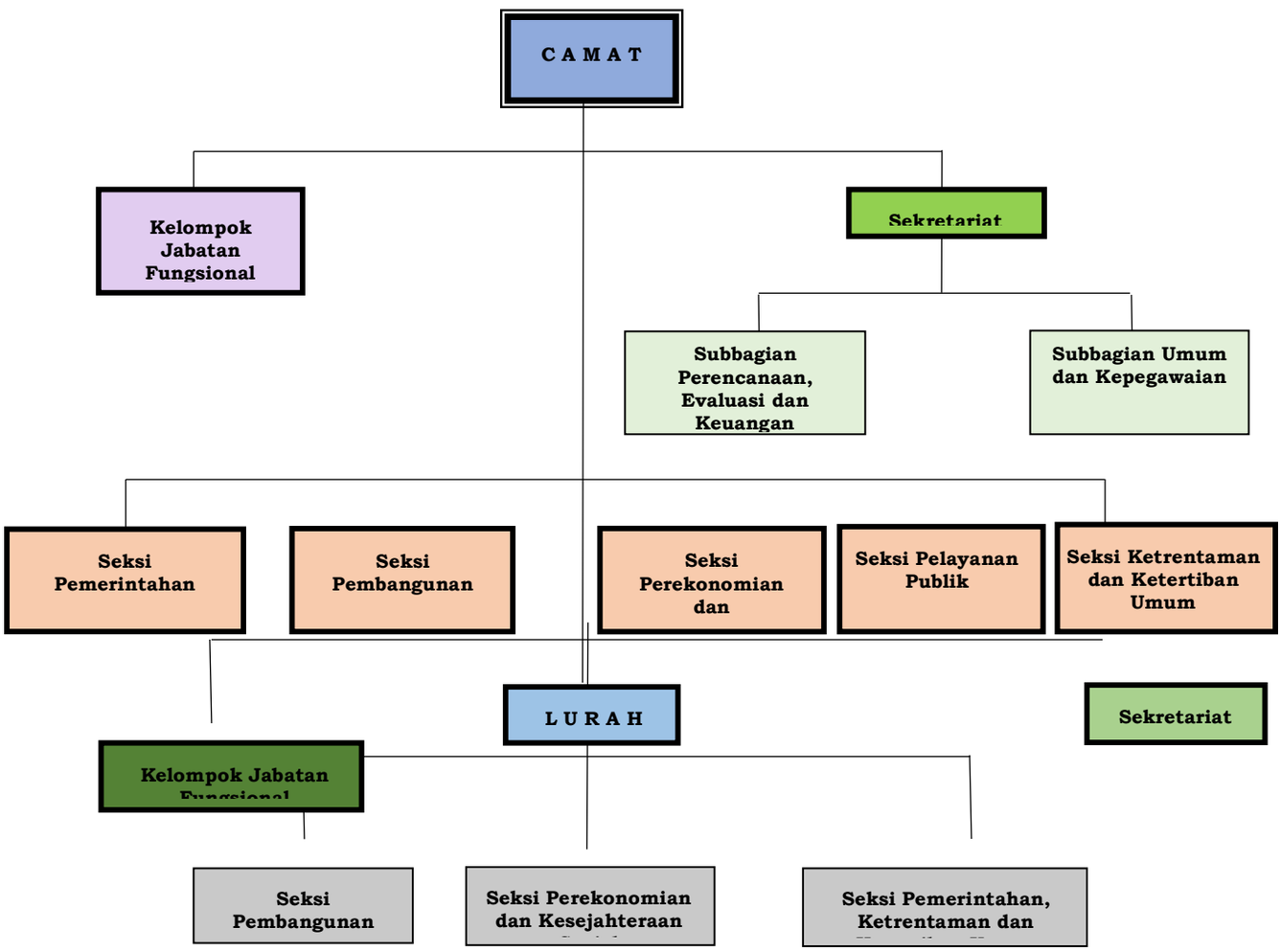

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Banyumanik

Adapun untuk Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Banyumanik yaitu sebagai berikut :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

1) perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5) penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6) penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11) penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
15) penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16) penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;

17) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
18) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
19) penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Banyumanik menyelenggarakan fungsi :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   d) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   e) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
   g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
   h) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
   b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
   d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
   a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
   b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
   a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   b) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   c) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
   d) evaluasi Kelurahan.
9) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
   e) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
   f) Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   g) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   h) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   i) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
   j) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

k) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
l) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
m) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
n) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
o) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
p) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
b) penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
c) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
d) pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan.

11) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
a) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
b) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
c) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
d) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
e) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

13) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
b) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
c) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

14) Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan,

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
7) pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
8) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
9) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
10) pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
11) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
12) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
13) pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
14) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
15) pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
16) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
17) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
18) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
19) pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
20) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
21) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;

22) pelaksanaan administrasi umum Kecamatan; pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
23) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
24) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
25) pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
26) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
27) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
28) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
29) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
6) menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
7) menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
10) menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
11) menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
13) menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;

14) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
17) menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
20) menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
22) menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
24) menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
25) menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
26) menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
27) menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
28) menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
29) menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
30) menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
32) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
34) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
35) menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;

36) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
37) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
39) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
40) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
41) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
42) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Pembangunan
Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
6) menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
9) menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
10) menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
11) menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16) menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
17) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
18) menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);

20) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
21) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
22) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
24) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
25) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
28) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
29) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
30) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
32) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
33) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
8) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
11) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi,

kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);

12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
13) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
14) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
20) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
21) menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
22) menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
23) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
25) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
26) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
27) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
28) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
29) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
30) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
31) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
32) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;

33) menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
34) menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
35) menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
36) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
37) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
38) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
39) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
40) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
41) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
42) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
43) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
44) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
6) menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
7) menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
8) menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
11) menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
12) menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

13) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
14) menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
15) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
16) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
17) menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
18) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
19) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
20) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
21) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
22) menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
24) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
26) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
27) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

10) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
11) menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
20) menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum; u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
21) menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
25) menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
28) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;

29) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
30) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
32) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
34) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
35) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
37) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
38) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
39) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
40) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2) pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
9) pelaksanaan kegiatan koordinasi;
10) pelaksanaan kegiatan sekretariat;
11) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
12) pelaksanaan kegiatan pembangunan;
13) pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
14) pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
15) pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
16) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
17) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
18) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
19) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
20) pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan

21) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
   3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   4) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   5) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
   2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
   3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
   4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
2) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
3) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
4) evaluasi Kelurahan;

i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2) peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
3) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
4) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
5) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
6) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
7) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;

8) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
9) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
10) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
1) pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
2) penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
3) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
4) Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
1) penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
2) peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3) penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
4) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
5) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;
n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan
o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

II.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Juli 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 97 pegawai, dengan jumlah 44 pegawai laki – laki (36,67%) dan 53 pegawai perempuan (44,17%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN)

sebanyak 23 pegawai, yang terdiri dari 20 pegawai laki-laki (16,67%) dan 3 pegawai perempuan (2,5%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebanyak 120 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Kecamatan Banyumanik didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 sebanyak 10 orang (8,3%), S1 sebanyak 51 orang (42,5%), D3 sebanyak 23 orang (19,17%), lulusan SMA sebanyak 12 orang (10%), dan lulusan SMP sebanyak 1 orang (0,83%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 1 orang (0,83%) merupakan lulusan SD, 17 Orang (14,17%) lulusan SMA, dan sisanya sebanyak 5 orang (4,17%) merupakan lulusan S1.

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN				NON ASN			
		L	P	Jumlah	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	L	P	Jumlah	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	**35**	**49**	**84**	**70**	**3**	**2**	**5**	**4,17**
1	S2	7	3	10	8,33	0	0	0	0
2	S1	20	31	51	42,5	3	2	5	4,17
3	D3	8	15	23	19,17	0	0	0	0
	Bukan Perguruan Tinggi	**9**	**4**	**13**	**10,83**	**18**	**1**	**18**	**15**
4	SLTA	8	4	12	10	16	1	17	14,17
5	SLTP	1	0	1	0,83	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0	1	0	1	0,83
Jumlah		**44**	**53**	**97**	**80,83**	**21**	**3**	**23**	**19,17**
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		**120**							

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, per Juli 2025

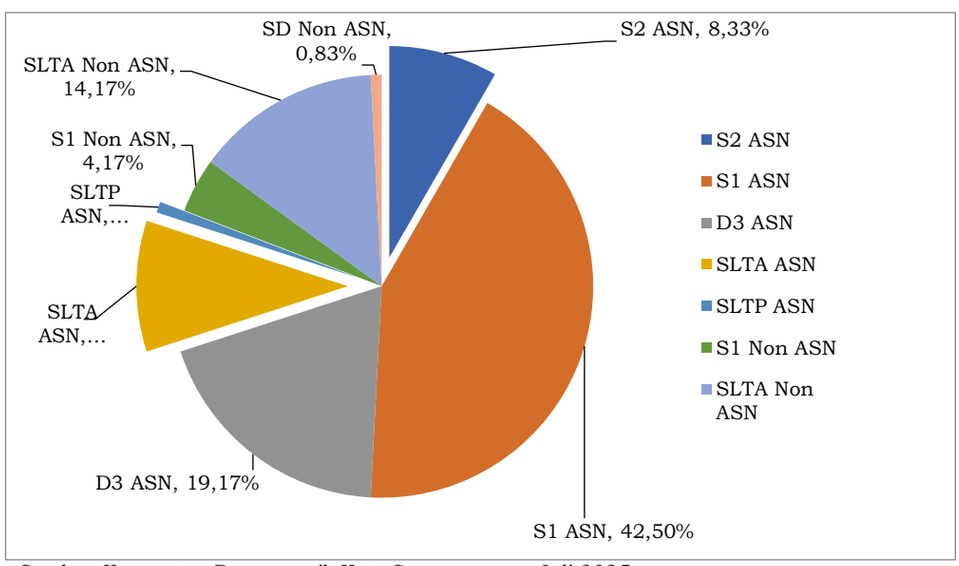

Sumber: Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, per Juli 2025

Gambar 2.2
Komposisi ASN dan Non ASN Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN Kelurahan pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah ASN dan Non ASN per unit pada Kecamatan
Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kecamatan /Kelurahan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kecamatan	4	17	5	18	1	1	49
2	Banyumanik	-	3	2	1	-	-	6
3	Gedawang	-	3	2	2	-	-	7
4	Jabungan	-	4	3	2	-	-	9
5	Ngesrep	1	5	1	-	-	-	7
6	Padangsari	1	2	3	-	-	-	6
7	Pedalangan	-	5	1	-	-	-	6
8	Pudakpayung	1	3	2	2	-	-	8
9	Srondol Kulon	-	3	1	2	-	-	6
10	Srondol Wetan	-	3	1	1	-	-	5
11	Sumurboto	1	4	1	-	-	-	6
12	Tinjomoyo	2	4	1	1	-	-	8
Jumlah		**10**	**56**	**23**	**29**	**1**	**1**	**120**

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, per Juli 2025

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 4 pegawai (4,30%), golongan III sebanyak 59 pegawai (63,44%), golongan II sebanyak 21 pegawai (22,58%), dan golongan IX sebanyak 9 pegawai (9,68%) dan golongan dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
1.	**Golongan IV**	**4**	**4,30**
	IV/b	1	1,08
	IV/a	3	3,23
2.	**Golongan III**	**59**	**63,44**
	III/d	27	29,03
	III/c	23	24,73
	III/b	4	4,30
	III/a	5	5,38

No	Golongan / Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
3.	**Golongan II**	**21**	**22,58**
	II/d	16	17,20
	II/c	4	4,30
	II/b	1	1,08
4.	**Golongan IX**	**9**	**9,68**
	IX	9	9,68
JUMLAH		**93**	**100,00**

Sumber: Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, per Juli 2025

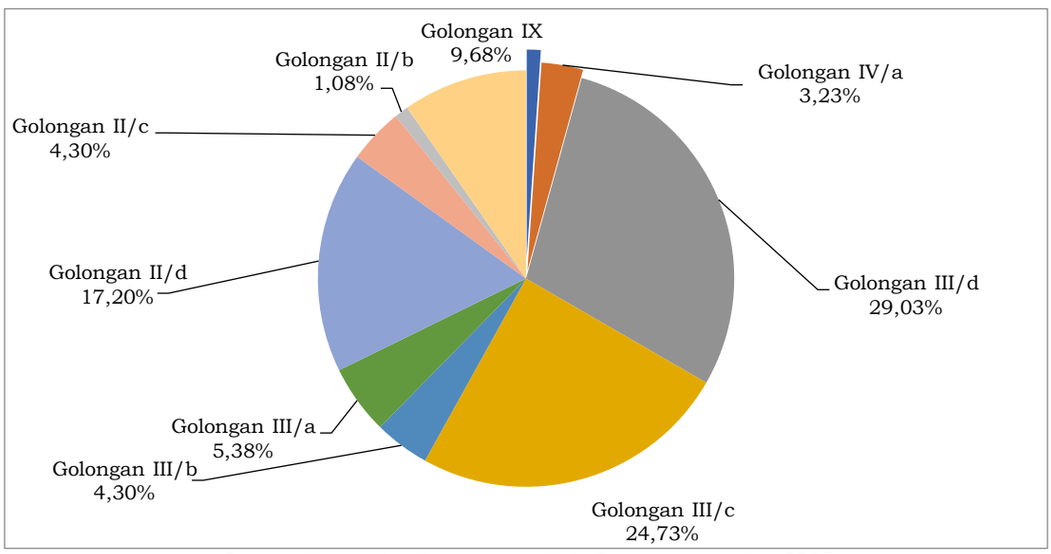

Sumber: Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, per Juli 2025

Gambar 2.3
Komposisi ASN Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2025
Berdasarkan Golongan / Ruang

b. Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Aset Tanah Kecamatan Banyumanik

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Kampung	4.604,00	1921	Jl. H. Suradi Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Kuburan	PEMBELIAN	920,80	- APBD-50.10.01.00
2	Tanah Kampung	1.000,00	1945	Jl. Watu Kaji Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Kuburan	PEMBELIAN	200,00	- APBD-50.10.01.00
3	Tanah Kampung	2.500,00	1945	Komplek Kramat Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Kuburan	PEMBELIAN	150,00	- APBD-50.10.01.00
4	Tanah Kampung	8.500,00	1945	Jl. Siasem Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Kuburan	PEMBELIAN	425,00	- APBD-50.10.01.00
5	Tanah Kampung	10.000,00	1950	Jl. Durian Utara Dalam II Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Pemakaman	PEMBELIAN	2.000.000,00	- APBD-50.10.08.00
6	Tanah Lapangan Bola Volly	9.613,00	1960	Jl. Parikesit Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Lapangan Olah Raga	PEMBELIAN	2.759.839,52	- APBD-50.10.01.00
7	Tanah Kampung	3.900,00	1966	Jl. Bumirejo RT 06 RW VI Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik	Hak Pakai		Proses Sertifikat	JSDF	PEMBELIAN	401.700,00	- APBD-50.10.01.00
8	Tanah Kampung	19.750,00	1967	Jl. Bumirejo RT 06 RW VI Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Lapangan Sepakbola	PEMBELIAN	2.034.250,00	- APBD-50.10.01.00
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.209,00	1979	Jabungan	Hak Pakai	8/15/2007	10	Rumah dinas	PEMBELIAN	16.418,00	
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.065,00	1979	Jl Gaharu Utara	Hak Pakai	4/30/2007	41	Fasum	PEMBELIAN	42.600,00	
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.030,00	1979	Jl Nusa Indah RW 07 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/11/2007	59	Taman Gizi	PEMBELIAN	46.350,00	
12	Tanah Pensil Lainnya	16.307,00	1979	Jabungan	Hak Pakai	8/15/2007	9	Madrasah Ibtidaiyah	PEMBELIAN	32.614,00	

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
13	Tanah Pertanian Lainnya	1.288,00	1979	Jl Gaharu Utara Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	27	Pertanian	PEMBELIAN	51.520,00	
14	Tanah Lapangan Sepak Bola	5.682,00	1979	Jabungan	Hak Pakai	8/15/2007	8	Lap Sepak Bola	PEMBELIAN	11.364,00	
15	Tanah Lapangan Taman lainnya	877,00	1979	Jl. Setyabudi	Hak Pakai	4/30/2007	48	Taman depan ADA	PEMBELIAN	3.508,00	
16	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	379,00	1981	RT.03 RW.VII Kel Pedalangan Kec Banyumanik				Balai Serba Guna	PEMBELIAN	2.347.905,00	Tanah Fasum
17	Tanah Kampung	2.451,00	1993	Jl. Tirto Agung RT 01 RW 03 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik	Hak Pakai				PEMBELIAN	2.401.980,00	-APBD-50.10.01.00
18	Tanah Kampung	2.451,00	1993	Jl. Tirto Agung RT 03 RW 01 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik	Hak Pakai				PEMBELIAN	2.401.000,00	- APBD-50.10.01.00
19	Tanah Kampung	10.500,00	1993	Jl. Mulawarman barat II RT 04 RW 04 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik	Hak Pakai				PEMBELIAN	4.200.000,00	- APBD-50.10.01.00
20	Tanah Kampung	2.451,00	1993	Jl. Tirto Agung Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik	Hak Pakai				PEMBELIAN	900.000,00	- APBD-50.10.01.00
21	Tanah Kampung	1.200,00	1993	Jl. Jangli Perbalan Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Pembibitan Anggrek	PEMBELIAN	240.000,00	- APBD-50.10.09.00
22	Tanah Kampung	700,00	2009	Jl. Teuku Umar Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Eks Kantor Kecamatan Semarang Selatan	PEMBELIAN	1.401.700,00	Hasil penilaian 2009 - Lain-Lain-50.10.10.00
23	Tanah Kampung	9.586,00	2009	JL. Bukit Umbul RT 05 RW 04 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/29/2018	HP 26	Lapangsan Sepak Bola	PEMBELIAN	8.060.100,00	Hasil Penilaian tahun 2009 - Lain-Lain-50.10.12.00
24	Tanah Kampung	4.133,00	2009	Jl. Prof Soedarto No.71 RT 01 RW 04 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Kantor Kelurahan, Rundin, balai Kelurahan	PEMBELIAN	12.848.800,00	Hasil Penilaian tahun 2009 - Lain-Lain-50.10.12.00
25	tanah kampung lainnya (dst)	1.929,00	2009	Jl. Bukit Umbul RT 05 RW 04 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Hak Pakai		HP 27	Tanah Kosong	PEMBELIAN	2.209.900,00	Hasil penilaian tahun 2009 - Lain-Lain-50.10.12.00
26	tanah kampung lainnya (dst)	3.863,00	2009	Jl. Bukit Umbul RT 05 RW 04 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Tanah Kosong	PEMBELIAN	3.942.700,00	Hasil penilaian tahun 2009 -

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
											Lain-Lain-50.10.12.00
27	tanah kampung lainnya (dst)	932,00	2009	Jl. Prof Soedarto, SH No.88 RT 04 RW 03Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Hak Pakai		HP 28	TK PGRI	PEMBELIAN	3.222.600,00	Hasil penilaian tahun 2009 - Lain-Lain-50.10.12.00
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.116,00	2011	Jl. Wisma Prasetya Barat Kel. Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 11	Rumah Dinas	PEMBELIAN	1.953.000,00	- - 50.10.01.00
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.132,00	2011	Jl. Prof Soedarto,SH. No.116 Kel. Sumurboto Kec.	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Tanah Kantor Kec.Banyumanik, Rumdin Camat	PEMBELIAN	15.517.300,00	belum bersertipikat - Lain-Lain-50.10.01.00
30	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.708,00	2011	Jl. Tusam Raya No.30 RT 01 RW 01 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/4/2007	HP 8	Kantor, Balai, Rumah Dinas dan Pos Kamling	PEMBELIAN	1.120.000,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
31	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.495,00	2011	Jl. Wisma Prasetya Barat Kel. Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 6	Kantor Kel Padangsari	PEMBELIAN	2.850,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
32	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.573,00	2011	Jl. Situk Raya No.4 RT.002/RW.004 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/18/2007	HP 13	Kantor	PEMBELIAN	201.344,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
33	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.352,00	2011	Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/26/2007	HP 15	PKK, Rumdin, Kantor Kelurahan	PEMBELIAN	1.084,30	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
34	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	688,00	2011	Jln. H. Suradi Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/11/2007	HP 10	Kantor Kelurahan	PEMBELIAN	275.00,00	- - 50.10.01.00
35	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.710,00	2011	Jl. H. Suradi Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/11/2007	HP 8	Balai Kelurahan	PEMBELIAN	235,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
36	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	599,00	2011	Jl. H. Suradi Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/11/2007	HP 9	Rumah Dinas	PEMBELIAN	45,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
37	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	806,00	2011	Jl. Perintis Kemerdekaan No.9 Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 8	Kantor	PEMBELIAN	1.274.900,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
38	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.602,00	2011	Jl. Karangrejo I RT.01/RW.III Kel.	Hak Pakai	4/30/2007	HP 10	Balai dan Rumdin	PEMBELIAN	456.570,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Banyumanik Kec. Banyumanik							
39	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.363,00	2011	Jl. Raya Jabungan Kel. Jabungan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/5/2007	HP 1	Kantor dan Balai	PEMBELIAN	201,60	Tempat sendiri - APBD 50.10.04.00
40	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.023,00	2011	Jl. Jabungan Raya Kel. Jabungan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/26/2007	HP 7	Terminal dan Lapangan	PEMBELIAN	348,80	Tempat sendiri - APBD 50.10.04.00
41	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.195,00	2011	Jl. Potrosari Balai Desa No.6 Kel. Srondol Kulon Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 20	Kantor Kel Srondol Kulon	PEMBELIAN	650,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.07.00
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.509,00	2011	Jl. Bina Remaja No.37 RW 01 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai		HP 17	Kantor Kelurahan, Balai, Rumdin	PEMBELIAN	300.000,00	Tanah Kantor, Balai da Rumdin Kel Srondol Wetan terletak pada 1 bidang tanah (HP No.17) - APBD- 50.10.08.00
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.265,00	2011	Jl. Dr. Setia Budi Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 61	Kantor kelurahan, Balai dan Rumah Dinas	PEMBELIAN	900.000,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.09.00
44	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.340,00	2011	Tinjomoyo RT.002/RW.III Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik	Hak Pakai	3/30/1998	HP 4	Kantor Kelurahan	PEMBELIAN	268,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.10.00
45	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	317,00	2011	Jl. Prof. Soedarto, SH NO. 71 RT 01 RW 04 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/11/2007	HP 11	Kantor PKK Banyumanik	PEMBELIAN	656.800,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.12.00
46	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	592,00	2011	Jl. Jati Selatan Dalam II Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 25	TK Widuri	PEMBELIAN	391.000,00	- - 50.10.08.00
47	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	981,00	2011	Jl. Meranti Raya Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 24	TK Widuri	PEMBELIAN	785.000,00	- - 50.10.08.00
48	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.049,00	2011	Jl. Rasamala Utara VII Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/8/2007	HP 52	TK Mekar Indah	PEMBELIAN	650.000,00	- - 50.10.08.00
49	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	596,00	2011	Jl. Durian Raya RT 03 RW 01 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/4/2007	HP 9	Balai RW	PEMBELIAN	984.000,00	- - 50.10.01.00

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
50	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	80,00	2011	Jl. Pudaksari RT.09/RW.VI Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik	Hak Pakai	3/28/1998	HP 10	Pekarangan (Balai RW.VI Kel Pudakpayung)	PEMBELIAN	201,34	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
51	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.474,00	2011	Jl. Kruing Raya RW 17 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/4/2007	HP 61	Balai RW 17	PEMBELIAN	1.120.000,00	- - 50.10.08.00
52	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	527,00	2011	Jl. Gaharu Utara V RW 08 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/8/2007	HP 50	Balai RW. VIII	PEMBELIAN	422.000,00	- - 50.10.08.00
53	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	377,00	2011	Jl. Kruing Raya RW 03 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 45	Taman dan Balai RW	PEMBELIAN	330.000,00	- - 50.10.08.00
54	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	247,00	2011	Jl. Meranti Raya RW 14 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 23	Balai RW 14	PEMBELIAN	198.000,00	- - 50.10.08.00
55	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	325,00	2011	Jl. Jati Barat I RW 06 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 32	Balai RW 06	PEMBELIAN	260.000,00	- - 50.10.08.00
56	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	198,00	2011	Jln. Kruing VIII RW 16 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 36	Balai RW	PEMBELIAN	149.000,00	- - 50.10.08.00
57	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	225,00	2011	Jl. Gaharu Raya RW 12 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 29	Fasilitas Umum	PEMBELIAN	203.000,00	- - 50.10.08.00
58	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	922,0	2011	Jln.Kruing Raya RT 04 RW 16 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 46	Fasilitas Umum	PEMBELIAN	761.000,00	- - 50.10.08.00
59	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	356,00	2011	Jl. Gotong Royong RT.002/RW.I Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 12	Balai Warga	PEMBELIAN	132.200,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.10.00
60	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.195,00	2011	Tinjomoyo RT.001/RW.IV Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 11	Gedung Serba Guna dan Mushola	PEMBELIAN	407.100,00	Gedung Serbaguna, Mushola dan Kebun Bibit terletak pada 1 bidang tanah (HP No,00011) - APBD-50.10.10.00
61	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	201,00	2011	Jl. Gotong Royong RT.002/RW.I Kel.	Hak Pakai	4/30/2007	HP 13	Kantor Kelurahan	PEMBELIAN	24.200,00	Eks Kantor Kel Tinjomoyo, kondisi rusak -

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Tinjomoyo Kec. Banyumanik							APBD-50.10.10.00
62	Tanah Bangunan Puskesmas /Posyandu	520,00	2011	Jl. Gaharu Raya Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 28	Fasilitas Umum	PEMBELIAN	461.000,00	- - 50.10.08.00
63	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	300,00	2011	Jl. Gaharu Timur Dalam I Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai			Eks. Pendirian Balai RW. XI	PEMBELIAN	166.500,00	Limpahan dr DPKAD - Lain-Lain- 50.10.08.00
64	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2.524,400	2011	Jl. H. Suradi Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai	8/24/2007	HP 13	Lapangan	PEMBELIAN	621.000,00	- - 50.10.01.00
65	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	9.770,00	2011	JL. H. Suradi Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/26/2007	HP 11	Lapangan Olah Raga	PEMBELIAN	1.229,40	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
66	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	8.193,00	2011	Jl. Graha Prasetya Raya RW 01 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	12/28/2007	HP 63	Lapangan	PEMBELIAN	5.781.000,00	- - 50.10.08.00
67	Tanah Untuk Bangunan Masjid	401,00	2011	Jl. Taman Teuku Umar	Hak Pakai	12/14/2021	104	Masjid Al Ijaabah	PEMBELIAN	400.900,00	Gedung Serbaguna, Mushola dan Kebun Bibit terletak pada 1 bidang tanah-APBD-50.10.10.00
68	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	3.057,00	2011	Jl. Jati Raya Kel. Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai	12/28/2007	HP 19	Masjid Al Muhajirin	PEMBELIAN	5.350.000,00	- - 50.10.01.00
69	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	466,00	2011	Jl. Rasamala Utara VI Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/8/2007	HP 55	Masjid Al Huda	PEMBELIAN	326.0000,00	- - 50.10.08.00
70	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	554,00	2011	Jl. Saninten Raya Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 33	Masjid Nurul Hidayah	PEMBELIAN	332.000,00	- - 50.10.08.00
71	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	515,00	2011	Jl. Gaharu Timur Dalam II Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 22	Masjid Al Amin	PEMBELIAN	361.000,00	- - 50.10.08.00
72	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	563,00	2011	Jl. Jati Barat I Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 31	Masjid Al Kautsar	PEMBELIAN	394.000,00	- - 50.10.08.00
73	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	287,00	2011	Jl. Rasamala Utara VI Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/8/2007	HP 53	Fasilitas Umum	PEMBELIAN	187.000,00	- - 50.10.08.00

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
74	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	1.112,00	2011	Jl. Kruing Raya Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 38	Kantor/KOPERASI	PEMBELIAN	670.000,00	- - 50.10.08.00
75	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	143,00	2011	Jln. Kruing VIII Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 37	TPQ Al Azhar	PEMBELIAN	107.000,00	- - 50.10.08.00
76	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	1.280,00	2011	Jl. Gaharu Raya Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/8/2007	HP 56	Masjid Al Jauhari	PEMBELIAN	832.000,00	- - 50.10.08.00
77	Tanah Sawah Irigasi	7.423,00	2011	Jl. Jabungan Raya Kel. Jabungan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/5/2007	HP 4	Sawah (Lelang Garapan)	PEMBELIAN	709.000,00	- - 50.10.04.00
78	Tanah Sawah Irigasi	11.078,00	2011	Jln. Jabungan Raya Kel. Jabungan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/5/2007	HP 2	Sawah / Tanah Kosong	PEMBELIAN	1.220.000,00	- - 50.10.04.00
79	Tanah Sawah Irigasi	10.288,00	2011	Jl. Jabungan Raya Kel. Jabungan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/5/2007	HP 3	Sawah (Lelang Garapan)	PEMBELIAN	1.152,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.04.00
80	Tanah Tegalan	1.912,00	2011	Jl. Tirta Agung Barat V RT.01 RW.03 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/4/2007	HP 6	Lapangan Volly	PEMBELIAN	2.964.000,00	- - 50.10.01.00
81	Tanah Tegalan	1.287,00	2011	Jl. Grafika Kel. Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/5/2007	HP 15	Tegalan	PEMBELIAN	792.000,00	- - 50.10.01.00
82	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.044,00	2011	Kelurahan Ngesrep RT.007/RW.VI Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik	Hak Pakai	3/26/1997	HP 44	Pekarangan	PEMBELIAN	794.000,00	- - 50.10.09.00
83	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.318,00	2011	Jl. Wisma Prasetya Barat Kel. Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai	12/28/2007	HP 17	Pertanian	PEMBELIAN	2.203.000,00	- - 50.10.01.00
84	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	576,00	2011	Jl. Grafika Kel. Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 10	Tanah Kosong	PEMBELIAN	380.000,00	- - 50.10.01.00
85	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.882,00	2011	Jl. Grafika Kel. Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai	12/28/2007	HP 16	Pertanian	PEMBELIAN	1.773.000,00	- - 50.10.01.00
86	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3.169,00	2011	Jln. Jabungan Raya Kel. Jabungan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/5/2007	HP 6	Pertanian	PEMBELIAN	368.000,00	- - 50.10.04.00
87	Tanah Kebun Induk	1.784,00	2011	Kel Pudakpayung RT.09/RW.VI Kel.	Hak Pakai	7/4/2007	HP 14	Tanah Kosong	PEMBELIAN	183.000,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Pudakpayung Kec. Banyumanik							
88	Tanah Usaha	5.978,00	2011	Jl. Kali Jaten Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 7	Pertanian	PEMBELIAN	597,80	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
89	Tanah Usaha	794,00	2011	Jl. Watu Kaji Kel. Gedawang Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 6	Pekarangan	PEMBELIAN	119,10	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
90	Tanah Lapangan Sepak Bola	5.843,00	2011	Jl. Durian Utara III / 37 RT.04 RW.02 (Jl. Kampung) Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	12/5/2007	HP 10	Lapangan dan Jalan	PEMBELIAN	1.800.000,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
91	Tanah Lapangan Sepak Bola	4.900,00	2011	Jl. Durian Raya Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik (setelah Terowongan Jalan Tol)	Hak Pakai	7/4/2007	HP 7	Sawah	PEMBELIAN	4.047.388,62	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
92	Tanah Lapangan Sepak Bola	11.756,00	2011	Jl. Merbau Raya Kel. Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai	12/28/2007	HP 20	Lapangan Sepak Bola	PEMBELIAN	1.860.241,69	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00
93	Tanah Lapangan Sepak Bola	10.912,00	2011	Jl. Jabungan Kel. Jabungan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	7/29/2011	HP 11 dan 12	Lapangan Olah Raga dan Fasilitas Pendukung Lainnya	PEMBELIAN	633,60	1 bidang tanah, 2 sertipikat - APBD- 50.10.04.00
94	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.429,00	2011	Jl. Karang Rejo Selatan RT.003/RW.III Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 9	Lapangan	PEMBELIAN	1.121.537,17	Tempat sendiri - APBD 50.10.10.00
95	Tanah Untuk Jalan Desa	772,00	2011	Jl. Karang Rejo Selatan RT.002/RW.III Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 10	Jalan Lingkungan	PEMBELIAN	461.200,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.10.00
96	Tanah Untuk Jalan Khusus /Komplek	1.393,00	2011	Jl. Kampung (Tinjomoyo) RT.006/RW.II Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/5/2007	HP 14	Jalan Masuk Bonbin	PEMBELIAN	172,80	Tempat sendiri - APBD 50.10.10.00
97	Tanah Lapangan Taman lainnya	131,00	2011	Jl. Rengas Raya Kel. Padangsari Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 14	Taman	PEMBELIAN	111.000,00	- - 50.10.01.00
98	Tanah Lapangan Yaman lainnya	509,00	2011	Jln. Kruing Raya Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 44	Taman Kruing Barat Dalam	PEMBELIAN	356.000,00	- - 50.10.08.00

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
99	Tanah kampung lainnya (dst)	781,00	2011	Jl. Gaharu Utara V Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/8/2007	HP 51	Lapangan RW.VIII	PEMBELIAN	547.000,00	- - 50.10.08.00
100	Tanah kampung lainnya (dst)	474,00	2011	Jl. Saninten Raya Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/30/2007	HP 35	Lapangan	PEMBELIAN	356.000,00	- - 50.10.08.00
101	Tanah kampung lainnya (dst)	293,00	2011	Jl. Rasamala Utara VII Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	6/8/2007	HP 54	Balai RW	PEMBELIAN	196.000,00	- - 50.10.08.00
102	Tanah kampung lainnya (dst)	164,00	2011	Jln. Gaharu Raya Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 26	Fasilitas Umum	PEMBELIAN	112.000,00	- - 50.10.08.00
103	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	464,00	2012	Jl. Jati Raya Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik	Hak Pakai	4/23/2007	HP 30	Masjid Al Istiqomah	PEMBELIAN	325.000,00	- - 50.10.08.00
104	Tanah Sawah Irigasi	7.600,00	2013	Jl. Bumirejo RT.06 RW.06 Kel. Pudakpayung Kec.	Hak Pakai		Proses Sertifikat	JSDF	PEMBELIAN	6.840.000,00	Tempat sendiri - APBD 50.10.01.00

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Tabel 2.9
Gedung dan Bangunan Kecamatan Banyumanik

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	45	JL. Abdoel Madjid Djojoadiningrat		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	80.518,00
2	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	140	Jl. Bina Remaja		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	507.152,97
3	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	162	Jl. Tusam Raya No. 30		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	221.480,50
4	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	279	Jl. Tusam Raya No. 30		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	203.755,00
5	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	1195	Jl. Taman Teuku Umar		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	559.565,15
6	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	1340	Jl. Taman Teuku Umar		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	179.920,00
7	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	320	Jl. Wisma Prasetya Barat, Padangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.226.574,36
8	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	260	Jl. Tusam Raya No. 30		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.120,00
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	84	Jl Empu Sendok Pedalangan Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	30.000,00
10	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	96	Jl. Teuku Umar No. 56		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	230.848,15
11	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	178	Jl. Teuku Umar		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	201.457,58
12	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	45	Jl. Teuku Umar No. 56		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	45.000,00
13	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	45	JL. Kalingga		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	50.062,19
14	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Baik	45	Jl. H. Suradi		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	73.277,21
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Kelurahan Jabungan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	6.400,00
16	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	108	Jl. H Suradi		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	958.276,59
17	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	72	Jl. Perintis Kemerdekaan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	63.000,00
18	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	144	Jl. H. Suradi		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	263.823,35
19	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	208	Jl. Perintis Kemerdekaan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	508.716,23
20	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	200	Jl. Waringin Putih		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	333.179,56
21	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	45	Jl. Waringin Putih		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	53.300,00
22	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	18	Jl. Perintis Kemerdekaan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	18.300,00
23	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	38	Jl. Perintis Kemerdekaan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	37.200,00
24	Candi	Baik	20	JL. Setuk No. 4		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	4.500,00

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
25	Tugu Pembangunan	Baik	15	Jl. Setuk No. 4		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	3.375,00
26	Tugu Peringatan Lainnya	Baik	45	Jl. Setuk No. 4		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.197.675,00
27	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	Baik	200	Jl. Perintis Kemerdekaan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	970.163,99
28	Bangunan Perambut Lain-lain (dst)	Baik	675	Jl. Prof. Soedarto, SH		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	13.064.929,24
29	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	Baik	110	Jl. Setuk No. 4		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	142.387,72
30	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	45	Jl. Tusam Raya No. 30		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	8.000,00
31	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	54	Jl. Profesol Soedarto no.116		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	51.900,00
32	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	578	Jl. Taman Teuku Umar		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.150.700,00
33	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kurang Baik	36	Jl. Prof. Soedarto, SH No.116		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	42.804,25
34	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	42	Jabungan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	132.473,93
35	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	200	Jalan Tusam Raya 30		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	461.767,16
36	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	18	Jl.Prof. Soedarto No.116		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	7.500,00
37	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	42	Srondol Wetan 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	88.895,00
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	150	Jl.Prof. Soedarto No.116		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	30.222,00
39	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	15	Jl. Prof. Soedarto No.116		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	35.946,00
40	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	30	Kel. Ngesrep		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	19.700,00
41	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	16	Kel Padangsari Kec Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	79.399,00
42	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	9	Kel Pudakpayung Kec Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	459.600,18
43	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	215	Jl. Bina Remaja		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	610.183,96
44	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	20	Pembuatan Galeri Kampung Tematik Kel.Ngesrep		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	46.850,67
45	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	20	Jl bangunharjo Kel.Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	73.998,06
46	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	15	Jl Tirto Agung Kel.Pedalangan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	57.212,47
47	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	15	Kampung Tematik Jabungan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	55.244,71
48	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	20	Srondol Kulon RT.01 RW.01		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	19.628,84
49	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	20	Villa Aster RT.01 RW.11 Kel.Srondol Kulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	19.844,79
50	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	10	Asrama Brigif RT.01 RW.03 Kel.Srondol Kulon		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	30.226,37
51	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	80	Temugiring RT.01 RW.05			PEMBELIAN	38.631,00
52	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	80	Jl. Jati Utara III RT.03 RW.03 Kel.Srondol Wetan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	31.401,13

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
53	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	80	Jl. Meranti barat dalam V RT.02 RW.15			PEMBELIAN	29.720,00
54	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	80	Jl. Waringin			PEMBELIAN	65.806,00
55	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	15	Kampung Tematik Kel.Ngesrep		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	34.956,55
56	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	10	Jl Temugiring Kel.Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	49.385,54
57	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	10	Kanfer Raya Kel.Pedalangan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	34.946,44
58	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	15	Pembuatan Gapura Kampung Tematik Kel.Jabungan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	119.972,06
59	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	15	Gapura Kampung Tematik Kel.Padangsari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	63.274,76
60	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	20	Jl. Seweru Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik			PEMBELIAN	86.794,62
61	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	12	Kelurahan Gedawang Kec Banyumanik			PEMBELIAN	69.049,31
62	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	Jl. Gaharu Timur Dalam RT.00 RW.11			PEMBELIAN	36.730,00
63	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	8470	Jl. Bukit Umbul			PEMBELIAN	895.080,22
64	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Baik	80	Jl Saninten Bar			PEMBELIAN	39.740,00
65	Pagar Permanen	Baik	20	Jl. Bumirejo RT.06 RW.06 Kel.Pudakpayung		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	49.771,92
66	Pagar Permanen	Baik	20	Jl. Siroto RT.07 RW.07 Kel.Pudakpayung		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	45.211,66
67	Pagar Permanen	Baik	20	Jl. Pucung RT.05 RW.08 Kel.Pudakpayung		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	44.016,42
68	Pagar Permanen	Baik	25	Jl. Sendangrejo V RT.01 RW.03 Kel.Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	34.646,00
69	Pagar Permanen	Baik	80	Srondol Bumi Indah RT 03 RW 01 Kel.Sumurboto			PEMBELIAN	32.666,00
70	Pagar Permanen	Baik	20	Jl. Rasamala Barat RT.06 RW.05 Kel.Srondol Wetan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	40.348,88
71	Pagar Permanen	Baik	80	Kec banyumanik			PEMBELIAN	24.696,00
72	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	72	Jl. Prof. Soedarto, SH No.71 RT 01 RW 04 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	174.549,43
73	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	700	Jl. H. Suradi (Lapangan)			PEMBELIAN	786.988,41
74	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	190	Kel Srondol Wetan, Kec Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	103.595,00
75	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	190	Kelurahan Srondol Wetan II Kecamatan Banyumanik		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	197.859,00
76	Pagar Permanen	Baik	215.9	Jl. Prof. Soedarto, SH No.71 RT 01 RW 04 Kel.Sumurboto Kec.Banyumanik			PEMBELIAN	1.093.790,60
77	Pagar Permanen	Baik	140	Jl. Mr. Abdoel Madjid Djojoadiningrat			PEMBELIAN	281.755,00
78	Pagar Permanen	Baik	62.93	Jl perintis kemerdekaan			PEMBELIAN	202.244,16

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
79	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	12.5	Jl. H Suradi Gedawang Banyumanik			PEMBELIAN	269.357,36
80	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	642	Jl. Potrosari Kel.Srondol Kulon			PEMBELIAN	3.023.658,16
81	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	2237	Jl. Prof. Soedarto, SH No.116 Semarang			PEMBELIAN	8.026.199,40
82	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	15	Jl. Potrosari Kel.Srondol Kulon			PEMBELIAN	102.603,00
83	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	107	Merbau Timur RT 03 RW 07			PEMBELIAN	698.736,51
84	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Baik	30	Tinjomoyo Kel.Tinjomoyo Kec.Banyumanik			PEMBELIAN	208.120,15
85	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	15	Jl. Prof. Soedarto, SH No.71 Rt 01 Rw 04 Kel. Sumurboto			PEMBELIAN	65.238,00
86	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	30	Jl. Tusam Raya RT 03 RW 01 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik			PEMBELIAN	291.278,00
87	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	466	Jl. Gaharu Raya			PEMBELIAN	541.753,29
88	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	242	Lapangan Merbau			PEMBELIAN	195.830,22
89	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	107	Lapangan Merbau			PEMBELIAN	50.472,31
90	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	104	Jl. Gaharu Raya			PEMBELIAN	392.793,54
91	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	590	Jl. Gaharu Raya			PEMBELIAN	169.726,72
92	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	488	Jl. Gaharu Raya			PEMBELIAN	123.097,91
93	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	220	Jl. Prof.Soedarto, SH No.116 Semarang			PEMBELIAN	1.132.740,25
94	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	Jl. Jabungan Raya			PEMBELIAN	198.791,84
95	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Baik	80	Jl. Gaharu Raya Srondol Wetan			PEMBELIAN	269.007,16
96	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Baik	100	Jl. Merbau Raya Padangsari			PEMBELIAN	175.521,51
97	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Baik	600	Jl. Gaharu Raya Srondol Wetan			PEMBELIAN	802.669,30
98	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik	100	Jl. Merbau Raya Padangsari			PEMBELIAN	84.387,03
99	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik	800	Jl. Merbau Raya Padangsari			PEMBELIAN	1.895.450,28
100	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik	100	Jl. Merbau Raya Padangsari			PEMBELIAN	315.398,69
101	Gedung Pertokoan /Koperasi/Pasar Permanen	Baik	400	Jl. Merbau Raya Padangsari			PEMBELIAN	1.869.808,75
102	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	100	Jl. Grafika Raya Padangsari			PEMBELIAN	143.875,00
103	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	60	Jl. Gaharu Raya Srondol Wetan			PEMBELIAN	146.714,00

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
104	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	100	Jl. Tirto Agung Pedalangan			PEMBELIAN	125.120,00
105	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	100	Jl. H. Suradi Gedawang			PEMBELIAN	130.201,00
106	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	100	Jl. Bumirejo Pudakpayung			PEMBELIAN	107.951,90
107	Bangunan Tempat Bermain Anak	Baik	100	Jl. Merbau Raya Padangsari			PEMBELIAN	55.724,01
108	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	30	Jl. Merbau Raya Padangsari			PEMBELIAN	212.878,35
109	Bangunan Parkir lainnya (dst)	Baik	100	Jl. Merbau Raya Padangsari			PEMBELIAN	86.377,43
110	Taman Semi Permanen	Baik	100	Jl. Gaharu Raya Srondol Wetan			PEMBELIAN	307.440,51
111	Taman lainnya	Baik	200	Jl. Prof Soedarto, SH No.116			PEMBELIAN	656.098,41
112	Gedung Pertokoan /Koperasi/Pasar Permanen	Baik	30	Jabungan Raya (Terminal Jabungan)			PEMBELIAN	103.300,00
113	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	112.5	Jl. Bukit Umbul Kel.Sumurboto Kec.Banyumanik			PEMBELIAN	55.750,00

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

II.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Pada dokumen Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Kecamatan Banyumanik di bidang kewilayahan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
1.	**Indikator Tujuan :**															
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,34	87,93	87,50	88,00	93,00	89,34	87,93	97,04	90,78	97,22	100,00%	100,00%	111,00%	103,16%	104,54%
2.	**Indikator Sasaran :**															
a.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	100,00%	100,00%	500,00%	500,00%	600,00%
b.	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	-	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
c.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80,00%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%					101,01%
d.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	50,00%	49,00%	52,00%	56,00%	-	50,00%	50,00%	52,00%	100,00%	-	100,00%	102,00%	100,00%	178,57%
e.	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	50,00%	49,00%	52,00%	56,00%	-	50,00%	50,00%	52,00%	100,00%	-	100,00%	102,00%	100%	178,57%
f.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	-	86,68%	60,00%	70,00%	80	-	86,68%	60,00%	94,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	134,29%	125%
3.	**Indikator Program :**															
a.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
b.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
c.	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
d.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
e.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
f.	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
g.	Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
h.	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
i.	Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan RT	88,00%	95,00%	-	-	-	89,00%	95,00%	-	-	-	101,00%	100,00%-	-	-	-
j.	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k.	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
l.	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan Kelurahan)	792 Kegiatan	810 Kegiatan	-	-	-	792 Kegiatan	810 kegiatan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
m.	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	53,00%	67,56%	-	-	-	66,42%	67,56%	-	-	-	125,00%	100,00%	-	-	-
n.	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan	93,81%	97,11%	-	-	-	96,22%	97,11%	-	-	-	102,00%	100,00%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	Pembangunan Dalam Musrenbang															
o.	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
p.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar PATEN	90,9%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
q.	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	19.144 Pelayanan	19.347 Pelayanan	-	-	-	19.144 Pelayanan	19.347 Pelayanan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
r.	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	11 Kelurahan	11 Kelurahan	-	-	-	11 Kelurahan	11 Kelurahan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
s.	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
t.	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan	94,31%	95,69%	-	-	-	94%	95,69%	-	-	-	99,67%	100,00%	-	-	-
u.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	84,00%	85,00%	87,50%	91,00%	93,00%	84,00%	85,00%	97,50%	91,00%	97,22%	100,00%	100,00%	110,86%	100,00%	104,54%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
v.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
w.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	-	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
x.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	90,00%	90,00%	95,00%	-	-	90,00%	90,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	105,26%
4.	**Indikator Lainnya**															
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	81,95	83,17	-	-	-	81,95	83,17	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Keamanan dan Ketertiban	-	-	10,00%	10,00%	15,00%	-	-	10,00%	9,50%	15,00%	-	-	100,00%	95,00%	100,00%
c.	Nilai AKIP	66,46	66,46	75,00	75,50	76,00	66,46	66,46	71,25	75,60	72,60	100,00%	100,00%	95,00%	100,13%	95,53%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.11
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,34	87,93	97,00	90,78	97,22

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

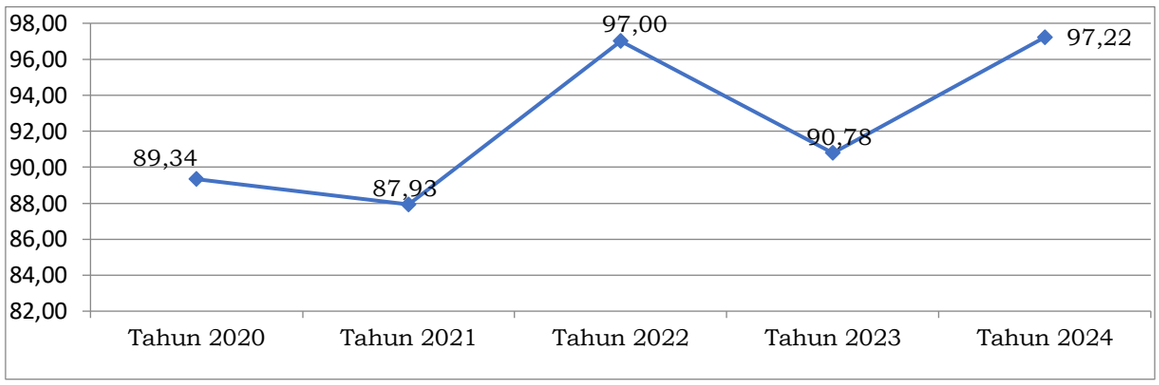

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Gambar 2.5
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

Selain dari Indeks Kepuasan Masyarakat, kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik juga dilihat dari Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.12
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

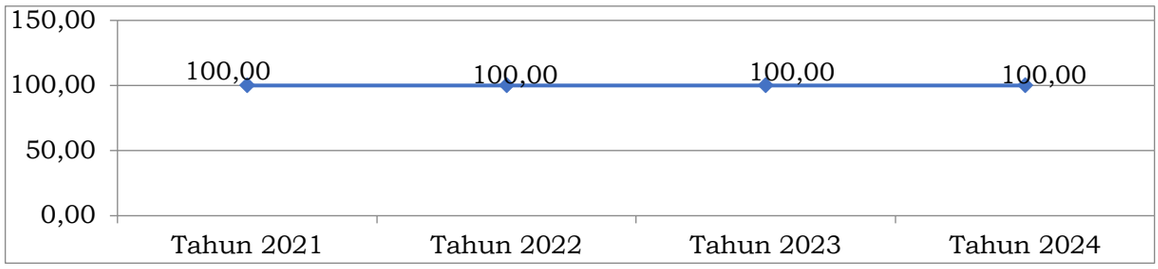

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Gambar 2.6
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020-2024

Sedangkan untuk Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.13
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

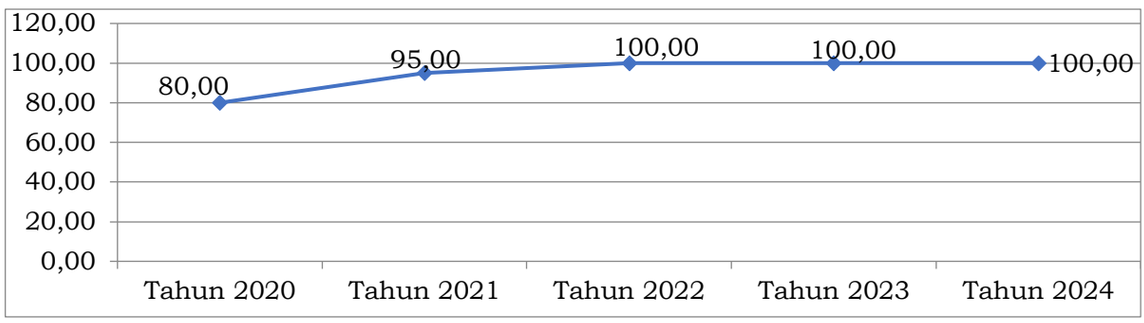

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Gambar 2.7
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

Kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.14
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum	-	50,00%	50,00%	52,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

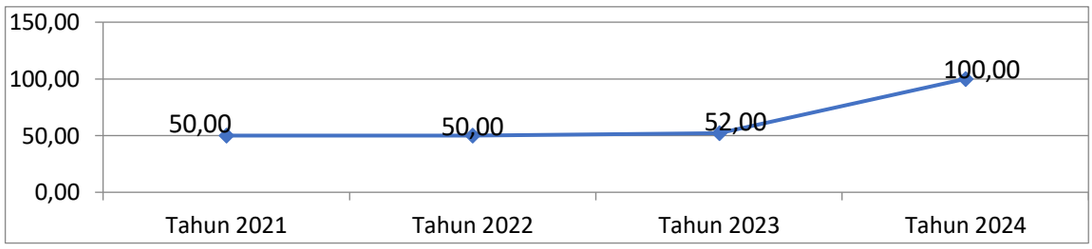

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Gambar 2.8
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

Sedangkan untuk Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.15
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	60,00%	94,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

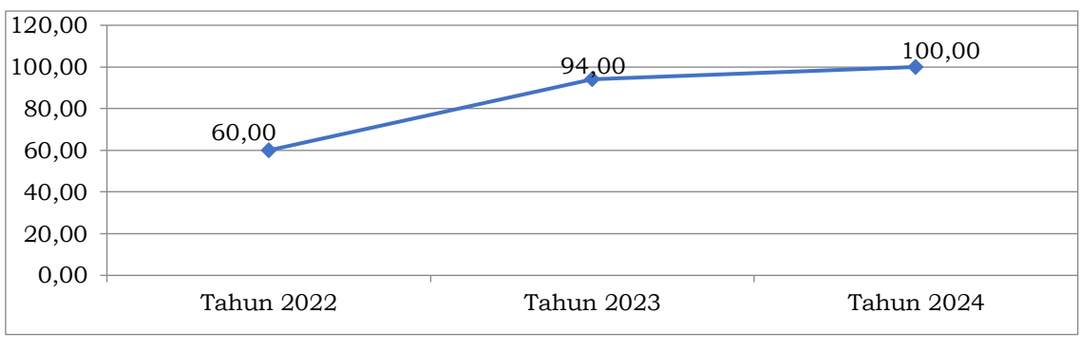

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Gambar 2.9
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2020-2024 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menerima total alokasi anggaran sebesar Rp 232.657.505.036,- dengan realisasi sebesar Rp 225.065.307.406,- (96,74%). Secara rinci anggaran beserta realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaksanaan Urusan
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	JUMLAH BELANJA	**20.773.754.000**	**48.234.818.960**	**47.973.059.190**	**50.861.711.432**	**53.272.013.060**	**20.527.541.755**	**45.735.383.466**	**47.064.456.577**	**50.121.997.186**	**50.274.115.319**	**98**	**96**	**97**	**99**	**95**	**8**	**7**
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	522.027.000	0	0	0	0	496.931.500	0	0	0	0	95,19	0	0	0	0	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	128.260.000	0	0	0	0	128.260.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	212.215.000	0	0	0	0	211.441.000	0	0	0	0	99,64	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	4.288.344.000	0	0	0	0	4.260.897.650	0	0	0	0	99,36	0	0	0	0	0	0
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.096.298.000	0	0	0	0	13.976.838.981	0	0	0	0	99,15	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	768.180.000	0	0	0	0	700.242.624	0	0	0	0	91,16	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	351.490.000	0	0	0	0	345.990.000	0	0	0	0	98,44	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	406.490.000	0	0	0	0	406.490.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Intensifikasi PAD	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	16.536.495.160	16.662.200.039	17.136.383.901	18.777.762.061	0	15.549.617.732	16.326.093.695	16.639.616.240	18.049.871.558	0	96,51	97,98	97,1	96,12	4,33	5,10
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	13.892.485.186	3.125.969.640	2.878.541.066	.239.282.95.	0	12.726.739.283	2.859.184.230	2.842.463.490	3.111.160.887	0	91,61	91,47	98,75	96,04	-38,45	-37,47

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	17.631.001.341	28.107.104.531	30.664.586.462	31.027.768.046	0	17.290.491.651	27.803.703.652	30.461.925.456	28.906.732.874	0	98,07	98,92	99,34	93,16	20,73	18,69
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	174.837.273	27.069.380	16.200.000	36.000.000	0	168.534.800	27.055.000	16.200.000	36.000.000	0	96,4	99,95	100	100	-40,95	-40,22
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	50.715.600	166.000.003	191.200.000	0	0	48.420.000	161.792.000	170.350.000	0	0	95,47	97,47	89,1	94,17	87,57

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

c. Inovasi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Terkait pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. ON THE SPOT LANSIA
   Menjadikan perilaku warga masyarakat yang peduli lingkungan yang terintegrasi segala aspek kehidupan. On The Spot Lansia menjadi wadah atau Gerakan untuk lebih memperhatikan kelangsungan hidup lansia. Masyarakat bisa hidup berdampingan dengan saling tolong menolong, serta memiliki toleransi yang tinggi. Warga lansia juga merasa lebih didukung serta diperhatikan oleh Pemerintah Kota Semarang.
2. BANYUMANIK TANGANI LONGSOR (BATAGOR)
   Dengan implementasi konsep "Banyumanik Tangani Longsor" yang terencana dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan risiko bencana longsor di Kecamatan Banyumanik dapat dikurangi secara signifikan. Langkah-langkah preventif dan mitigasi yang dilakukan tidak hanya akan melindungi masyarakat dari ancaman longsor tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.
3. BERSIH (Banyumanik Edukasi Ramah Sampah Inspiratif Hijau)
   Pemberdayaan Bank Sampah sebagai salah satu ujung tombak dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu sosialisasi dan pembinaan secara masif terkait pilah sampah/pengelolaan sampah. Dikembangkan dalam implementasi melalui "GUMREGAH (GERAKAN TERPADU MASYARAKAT MENGELOLA SAMPAH)".
4. GEMAR MANISAN (GERAKAN MASYARAKAT BANYUMANIK MENGATASI ANAK STUNTING)
   Program ini bertujuan mengedukasi dan memberdayakan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan yang baik bagi anak-anak. Dengan meningkatkan kesadaran akan masalah stunting, program ini dapat mengurangi angka stunting di Kecamatan Banyumanik. Selain itu, program ini juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.
5. BERKAH (Banyumanik Ekonomi Rakyat Kreatif AmanaH)
   Meningkatnya penjualan produk UMKM dikarenakan kualitas produk dan harga yang bersaing, meningkatnya perekonomian di wilayah Kecamatan Banyumanik.
6. BERGARANSI: Banyumanik Berantas Gratifikasi, Mengatasi Korupsi
   Terlaksananya Program Kegiatan BERGARANSI di Kecamatan Banyumanik yang ada di Kecamatan Banyumanik. Tumbuhnya kesadaran warga masyarakat serta partisipasi dalam pentingnya ikut serta dalam mewujudkan tolak gratifikasi di wilayah Kecamatan Banyumanik. Meningkatkan Citra guna menumbuhkembangkan Anti Gratifikasi Warga pada Pemerintah Kota Semarang.

II.1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Banyumanik dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan
   Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Banyumanik sebagai berikut:
   1. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam mengembangkan wilayah melalui perencanaan Pembangunan Kecamatan;
   2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik;
   3. Potensi konflik sosial, gangguan keamanan, gangguan ketenteraman dan ketertiban yang mungkin terjadi di wilayah Kecamatan Banyumanik;
   4. Kesiapan masyarakat di wilayah Kecamatan Banyumanik dalam pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik masih rendah.

b. Peluang
   Sedangkan peluang bagi Kecamatan Banyumanik untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:
   1. Peran kecamatan dan kelurahan yang semakin besar dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
   2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Digitalisasi Pelayanan) dan Keterbukaan Informasi;
   3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui keterlibatan aktif bisa menjadi pengawas, pendorong peningkatan layanan dan memotivasi perubahan.

II.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANYUMANIK

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

II.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang

adalah **"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan"**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Banyumanik terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **"Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan"**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah **"Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan"**.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif
   Data yang tersedia menunjukkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif belum optimal, dimana dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 80,00% pada Tahun 2020; 95,00% pada Tahun 2021; 84,00% pada Tahun 2022; 100,00% pada Tahun 2023; serta 100,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan.
   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
b. Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan
   Dalam kurun waktu tahun 2021-2024, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional mengalami fluktuasi yaitu sebesar 87,00% pada Tahun 2021; 58,00% pada Tahun 2022, 100,00% pada Tahun 2023; serta 100,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.
   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan serta sinergitas lintas sektor dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Banyumanik;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Banyumanik;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Banyumanik;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Banyumanik;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Banyumanik;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Banyumanik;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Banyumanik;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Banyumanik;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Banyumanik;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Banyumanik;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Banyumanik;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Banyumanik.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.17
Rumusan Permasalahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2025 – 2029

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Banyumanik	belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Banyumanik
2	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Banyumanik	belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Banyumanik
		masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Banyumanik
3	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik	belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Banyumanik

II.2.2 TELAAHAN DOKUMEN LAINNYA

A. TELAAHAN RPJMN 2025 – 2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif.”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang,

dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal,

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di

pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.
Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Banyumanik mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif”** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.”**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat” (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Banyumanik mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat” (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran “Indeks Pelayanan Publik” (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran “meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang” (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran “Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu “Implementasi Reformasi

Birokrasi di seluruh perangkat daerah" (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Banyumanik secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Banyumanik dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

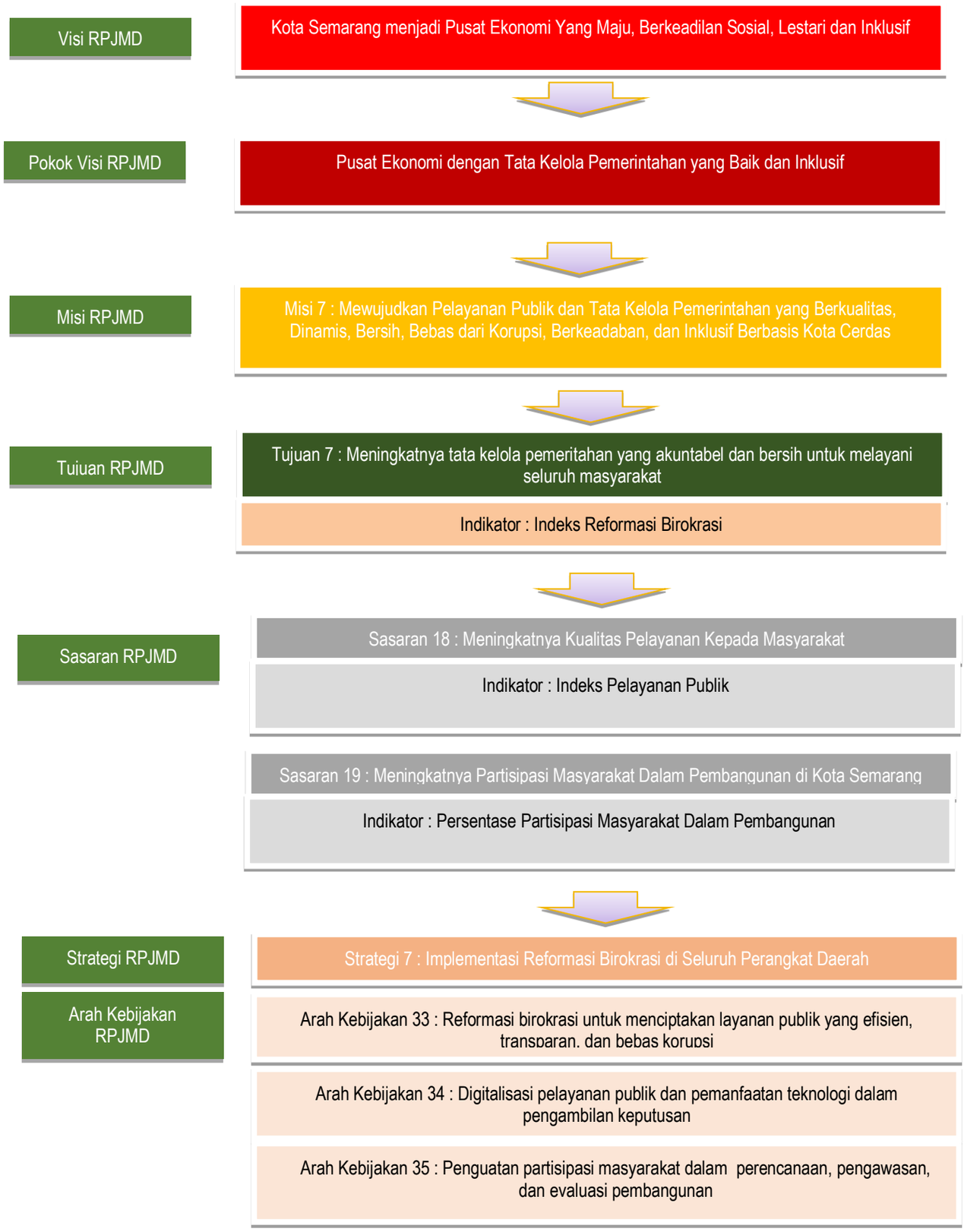

Gambar 2.10
Peranan Kecamatan Banyumanik dalam Mendukung Pencapaian
Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Kecamatan Banyumanik tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Dalam sistem pengembangan wilayah Kota, Kecamatan dikelompokkan dalam BWK yang meliputi:

a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa berskala internasional;
   - pusat pemerintahan Provinsi; dan
   - pusat pemerintahan Kota.
b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pusat pendidikan kepolisian; dan
   - pusat olahraga
c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - transportasi laut;
   - transportasi udara; dan
   - kantor pelayanan pemerintahan Provinsi
d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk; , dengan rencana pengembangan fungsi utama berupa industri.
e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - jasa pertemuan dan pameran.
f. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang, dengan rencana pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi.
g. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perkantoran militer; dan

- perdagangan dan jasa.

h. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - pendidikan tinggi; dan
   - paru-paru Kota.

i. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
   - paru-paru Kota.

j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu, dengan rencana pengembangan fungsi utama :
   - perdagangan dan jasa; dan
   - industri.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Banyumanik masuk dalam wilayah BWK IX, dengan rencana pengembangan fungsi utama sebagai kantor pelayanan pemerintahan kota.

Sedangkan untuk rencana struktur ruang Kecamatan Banyumanik meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 2.509 (dua ribu lima ratus sembilan) hektar;
2. Sub Pusat Pelayanan Kota, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. sub pusat pelayanan kota di BWK VII meliputi Kelurahan Srondol Kulon, Kelurahan Srondol Wetan, Kelurahan Banyumanik;
3. Pusat Lingkungan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala pelayanan lingkungan permukiman. Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di Kecamatan Banyumanik yaitu:
   a. pusat lingkungan VII.1 terdapat di Kelurahan Ngesrep dengan daerah pelayanan Kelurahan Tinjomoyo, Kelurahan Srondol Kulon dan Kelurahan Sumurboto;
   b. pusat lingkungan VII.2 terdapat di Kelurahan Pedalangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Srondol Wetan dan Kelurahan Padangsari; dan
   c. pusat lingkungan VII.3 terdapat di Kelurahan Gedawang dengan daerah pelayanan Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Jabungan dan Kelurahan Pudakpayung.

Rencana pengembangan sistem angkutan umum jalan raya diarahkan pada pengembangan sarana angkutan umum massal yang melewati ruasruas jalan utama yang meliputi koridor III dengan rute Tanjung Emas-Jl. Ronggowarsito-Jl. MT Haryono-Bundaran Bubakan-Jl. Pattimura-Jl. Dr. Cipto-Kaliwiru Perumahan Banyumanik. Peningkatan pelayanan trayek ranting angkutan umum meliputi Pasar Banyumanik-Karangrejo-Perum Trunojoyo-Pasar Damar; Pasar Banyumanik-Mega Rubber-Perum Kopkar; Pasar Banyumanik-Sukun-Tembalang-UNDIP, Pudakpayung-Banyumanik-Gapura Undip-Tembalang, Jabungan-Bulusan-Undip-Ngresep, Tinjomoyo-Jatingaleh-Gombel Permai, Jatingaleh-Jangli-Sapta Marga, Jatingaleh-Ksatrian-Jangli-Sapta Marga, Margaraya-Unika Soegijapranata-Tugu Suharto-SapanganPapandayan-Kagok, Tinjomoyo-Unika-Tugu Suharto-Pamularsih-Kalibanteng.

Peningkatan jalan bebas hambatan seksi A (Jatingaleh – Srondol) – Jalan Bebas hambatan seksi B (Jatingaleh – Krapyak). Pengembangan simpang susun Banyuman.

Kawasan pengungsian burung ditetapkan di Kelurahan Srondol Kulon Kecamatan Banyumanik; kawasan perlindungan satwa kera Ondorante di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik.

Rencana pengembangan waduk dan embung meliputi :

1. Waduk Garang dengan luas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar berada di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik.
   Rencana embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan Tembalang, Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari.

E. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA SEMARANG

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi Berikut adalah ketiga isu strategis lingkungan hidup Kota Semarang. 1. Menjamin keberlanjutan sumber daya air. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik. 3. Menurunkan laju penurunan muka tanah (land subsidence). dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (4) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan

masalah strategis “**Belum optimalnya pelayanan public yang “transparan dan akuntabel**”, dan isu strategis “**Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab**”, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.18
Tema isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Pilar	Masalah Strategis	Isu Strategis
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

F. TELAAHAN DOKUMEN LAINNYA

Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat global, nasional, maupun lokal. Komitmen terhadap kesetaraan gender tercermin melalui berbagai regulasi, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG, serta turunannya di tingkat daerah. Di Kota Semarang, penerapan PUG diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 tentang pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Kecamatan Banyumanik menjadi salah satu unit pemerintahan yang menempatkan isu gender sebagai arus utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Kecamatan Banyumanik tidak hanya mendokumentasikan kegiatan formal, melainkan juga merepresentasikan dinamika sosial, kelembagaan, serta inovasi lokal yang mencerminkan bagaimana PUG dapat diinternalisasikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.

Dalam literatur kebijakan publik, keberhasilan implementasi program sangat ditentukan oleh komitmen kelembagaan dan kepemimpinan (North, 1990; Peters, 2019). Kecamatan Banyumanik menegaskan hal ini melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah PUG, pembentukan focal point gender, serta integrasi isu kesetaraan dalam Rencana Kerja Tahunan. Peran camat sebagai pimpinan institusi menjadi kunci dalam memastikan arah kebijakan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional.

Kecamatan Banyumanik juga telah menyiapkan mekanisme kelembagaan melalui **Tim Focal Point PUG**, yang berfungsi sebagai penggerak dan pengawal kebijakan. Dari perspektif teori governance, keberadaan tim lintas sektor ini mencerminkan pendekatan *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), di mana koordinasi lintas perangkat dan partisipasi masyarakat menjadi penentu efektivitas.

Salah satu capaian penting adalah ketersediaan **data terpilah berdasarkan jenis kelamin**. Hal ini sesuai dengan prinsip *evidence-based policy* yang menekankan pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan. Data terpilah memungkinkan kecamatan untuk mengidentifikasi secara lebih presisi kelompok rentan, baik perempuan, laki-laki, anak, maupun penyandang disabilitas.

Selain itu, Kecamatan Banyumanik telah menerapkan **Anggaran Responsif Gender (ARG)**. ARG bukanlah anggaran terpisah, melainkan strategi untuk memastikan alokasi anggaran program pembangunan lebih adil dan merata. Dalam kerangka teori kebijakan fiskal (Stiglitz, 2000), ARG merupakan bentuk redistribusi yang memastikan keadilan distributif (*distributive justice*) dapat tercapai melalui instrumen anggaran. Kecamatan Banyumanik menunjukkan kapasitas adaptif dengan menghadirkan inovasi yang terkait langsung dengan isu gender dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa program unggulan/inovasi yang tercatat antara lain:

1. **GEMAR MANISAN (Gerakan Masyarakat Banyumanik Mengatasi Anak Stunting)**

   Program ini berfokus pada penanganan stunting yang secara empiris lebih banyak berdampak pada anak-anak dari keluarga miskin dan perempuan sebagai pengasuh utama. Pendekatan ini selaras dengan target SDGs, khususnya Tujuan 2 (Zero Hunger) dan Tujuan 3 (Good Health and Well-Being).

2. **BERSIH (Banyumanik Edukasi Ramah Sampah Inspiratif Hijau)** Program ini merupakan inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dari perspektif gender, isu pengelolaan sampah sering kali melibatkan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dalam aktivitas memilah dan mengelola sampah rumah tangga. Dengan demikian, program ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga pemberdayaan perempuan.

3. **BERKAH (Banyumanik Ekonomi Rakyat Kreatif Amanah)** Program pemberdayaan UMKM yang sensitif gender ini mendukung perempuan pelaku usaha mikro agar lebih kompetitif melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran digital. Literatur tentang *gender and development* (Kabeer, 1999) menunjukkan bahwa akses ekonomi bagi perempuan meningkatkan bargaining power dalam rumah tangga dan masyarakat.

Terdapat indikasi adanya tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan PUG di Kecamatan Banyumanik, antara lain :

Pertama, masih terbatasnya kapasitas aparatur dalam memahami konsep gender secara mendalam. Tantangan ini sejalan dengan temuan global (UNDP, 2016) bahwa salah satu hambatan terbesar dalam PUG adalah kesenjangan kapasitas birokrasi.

Kedua, resistensi kultural. Dalam masyarakat patriarkal, isu gender sering dianggap bukan prioritas, atau bahkan dianggap bertentangan dengan nilai tradisional. Hal ini menuntut strategi komunikasi publik yang persuasif agar PUG tidak dipersepsikan sebagai agenda asing, tetapi sebagai kebutuhan lokal.

Ketiga, keterbatasan anggaran. Meskipun ARG telah diterapkan, proporsi anggaran yang benar-benar responsif gender masih kecil dibandingkan total belanja kecamatan. Dalam perspektif teori alokasi sumber daya (Ostrom, 1990), alokasi yang minim berpotensi menciptakan kesenjangan implementasi.

Jika ditinjau dari kerangka teori keadilan distributif (Rawls, 1971), upaya Kecamatan Banyumanik dalam PUG mencerminkan prinsip *difference principle*, yakni kebijakan yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan posisi kelompok paling rentan. Sementara dari perspektif Kantian, kebijakan PUG menegaskan kewajiban moral negara untuk

memperlakukan setiap individu sebagai tujuan pada dirinya, bukan sekadar sebagai sarana.

Lebih jauh, integrasi PUG dalam program pembangunan di Banyumanik menunjukkan praktik nyata dari *intersectionality* (Crenshaw, 1989), di mana isu gender tidak dapat dilepaskan dari variabel lain seperti kelas sosial, akses ekonomi, dan kondisi lingkungan.

Dari sudut pandang governance, PUG Kecamatan Banyumanik memberi pelajaran penting mengenai bagaimana kecamatan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dapat berperan strategis dalam menginternalisasikan kesetaraan gender. Kecamatan tidak hanya menjalankan mandat administratif, tetapi juga bertindak sebagai laboratorium sosial untuk menguji efektivitas inovasi kebijakan berbasis gender.

Pada akhirnya, Kecamatan Banyumanik menegaskan bahwa kesetaraan gender bukanlah agenda tambahan, melainkan inti dari pembangunan berkelanjutan. Dengan memperlakukan setiap individu secara adil dan setara, Kecamatan Banyumanik tidak hanya memenuhi mandat regulasi, tetapi juga meletakkan fondasi moral dan sosial bagi terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif, resilien, dan berdaya.

Kebijakan mengenai Kota Layak Anak (KLA) telah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada generasi masa depan. Kota Semarang, melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, menegaskan komitmennya untuk menjadikan setiap anak sebagai subjek pembangunan. Kebijakan ini menekankan bahwa perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak anak tidak hanya merupakan tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks ini, Kecamatan Banyumanik memiliki posisi strategis sebagai unit pemerintahan tingkat menengah yang menjembatani kebijakan kota dengan kebutuhan warga di tingkat kelurahan. Implementasi Kecamatan Layak Anak di Banyumanik tidak hanya menjadi refleksi dari amanat hukum, tetapi juga bukti keseriusan pemerintah lokal dalam menghadirkan tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap isu perlindungan anak.

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2023 ini menegaskan beberapa prinsip mendasar dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak, antara lain:

1. Non-diskriminasi dalam pelayanan anak.
2. Kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.
3. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
4. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Kecamatan Banyumanik diarahkan untuk tidak hanya melaksanakan fungsi administratif, tetapi juga melakukan pengarusutamaan perspektif hak anak dalam setiap program pembangunan. Peraturan Daerah ini memposisikan kecamatan sebagai aktor penghubung antara struktur pemerintahan makro (kota) dengan struktur mikro (kelurahan, RT/RW, keluarga, dan individu anak).

Implementasi di Kecamatan Banyumanik

1. Penguatan Kelembagaan dan Forum Anak
   Salah satu indikator penting KLA adalah adanya Forum Anak yang berfungsi sebagai wadah partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan. Kecamatan Banyumanik, sesuai mandat Perda, mengoordinasikan pembentukan Forum Anak Kecamatan yang terhubung dengan forum di tingkat kelurahan. Kehadiran forum ini menegaskan bahwa anak-anak bukan sekadar objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang suaranya harus didengar dalam perencanaan pembangunan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga kegiatan sosialisasi di sekolah.
   Selain itu, pembentukan gugus tugas KLA di Banyumanik menjadi elemen penting dalam koordinasi lintas sektor. Gugus tugas ini melibatkan perangkat daerah, kelurahan, lembaga masyarakat, PKK, dunia usaha, hingga tokoh agama, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak terfragmentasi, melainkan sinergis.

2. Sarana dan Prasarana Ramah Anak
   Kecamatan Layak Anak menuntut adanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Di Banyumanik, hal ini diwujudkan melalui:
   a. Penyediaan taman ramah anak, seperti Taman Tirto Agung dan Taman Bumi Rejo, yang menjadi ruang publik aman untuk bermain dan berekreasi.
   b. Sekolah ramah anak yang didorong melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
   c. Fasilitas kesehatan ramah anak, seperti Puskesmas dengan layanan gizi, imunisasi, dan deteksi dini stunting.

   Ketersediaan sarana ini memperlihatkan keseriusan Banyumanik untuk menjawab kebutuhan anak tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga aspek psikososial.

3. Pengarusutamaan Perspektif Anak dalam Pembangunan
   Kecamatan Banyumanik telah berupaya mengintegrasikan perspektif anak ke dalam setiap perencanaan. Misalnya, dalam forum Musrenbang tingkat kecamatan, usulan dari forum anak dimasukkan sebagai bagian dari dokumen perencanaan tahunan. Praktik ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pembangunan untuk anak menjadi pembangunan bersama anak.

Analisis Akademis: Model Child-Centered Governance

Dari sudut pandang akademik, implementasi Kecamatan Layak Anak di Banyumanik merefleksikan konsep child-centered governance, sebuah pendekatan yang menempatkan anak sebagai pusat dari kebijakan publik. Teori ini mengacu pada pandangan bahwa kesejahteraan anak adalah indikator fundamental dari keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Pendekatan Banyumanik menunjukkan praktik governance hibrid (hybrid governance), yang menggabungkan peran negara, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Misalnya, peran PKK dan Karang Taruna dalam sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keterlibatan swasta melalui program CSR untuk fasilitas pendidikan, serta partisipasi forum anak dalam musyawarah pembangunan.

Implementasi Kecamatan Layak Anak di Banyumanik memberikan beberapa manfaat nyata, antara lain:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
b. Terbangunnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
c. Penguatan reputasi Kecamatan Banyumanik, baik di tingkat kota maupun nasional, sebagai kecamatan yang progresif dalam mewujudkan tata kelola ramah anak.
d. Secara makro, keberhasilan Banyumanik berkontribusi pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-3 (kesehatan yang baik), tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas), dan tujuan ke-16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).

Kecamatan merupakan simpul penting dalam sistem pemerintahan, sebuah unit yang berfungsi menjembatani kebijakan makro di tingkat kota atau kabupaten dengan kebutuhan mikro masyarakat di tingkat kelurahan. Fungsi kecamatan bukan semata administratif, melainkan juga strategis: membangun tata kelola yang responsif, mengintegrasikan aspirasi masyarakat, serta memastikan implementasi program pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks inilah lahir konsep Kecamatan Berdaya, sebuah paradigma baru yang menekankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan partisipasi warga sebagai modal sosial pembangunan. Namun, yang membedakan Kecamatan Berdaya dari sekadar jargon birokratis adalah keberakarannya pada visi politik dan kepemimpinan daerah. Program ini bukan inisiatif sporadis, melainkan bagian integral dari agenda pembangunan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan **Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.** dan **H. Taj Yasin** sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Dengan menempatkan Kecamatan Berdaya sebagai salah satu pilar visi mereka, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertegas orientasi pembangunan daerah yang people-centered, inklusif, dan menolak dominasi pendekatan top-down semata. Program ini menjadi bukti nyata bagaimana politik elektoral diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan konkret warga.

Kecamatan Berdaya dapat dianalisis melalui kerangka multilevel governance (Marks, Hooghe & Blank, 1996) yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada keterhubungan antar-level pemerintahan. Kecamatan dalam hal ini menjadi titik temu antara kebijakan provinsi, instrumen kota/kabupaten, dan partisipasi masyarakat di kelurahan.

Pendekatan multilevel governance memperlihatkan bahwa program-program besar di tingkat provinsi, seperti visi pembangunan gubernur terpilih, tidak mungkin berhasil jika tidak diturunkan menjadi praktik nyata di tingkat lokal. Di sinilah Kecamatan Berdaya mengambil peran sebagai “ruang terjemahan” visi makro ke dalam intervensi mikro yang menyentuh persoalan sehari-hari warga: pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, partisipasi sosial, hingga keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, gagasan pemberdayaan masyarakat dalam Kecamatan Berdaya juga berakar pada teori capability approach Amartya Sen (1999), yang menekankan bahwa pembangunan harus dilihat dari kemampuan nyata warga untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai. Dengan

demikian, keberdayaan masyarakat bukan sekadar retorika, melainkan indikator utama keberhasilan pembangunan.

Implementasi Kecamatan Berdaya menuntut pergeseran paradigma dari birokrasi kecamatan. Jika sebelumnya kecamatan sering dipersepsikan hanya sebagai perpanjangan administratif pemerintah kota/kabupaten, maka melalui program ini kecamatan harus menjadi agent of change sekaligus facilitator of empowerment.

Ada tiga dimensi strategis yang ditekankan:

a. Dimensi Administratif
   Kecamatan tetap menjalankan fungsi pelayanan publik dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan sederhana, dan fasilitasi pengaduan masyarakat. Namun, kualitas layanan harus ditingkatkan melalui inovasi digital, transparansi prosedur, dan efisiensi birokrasi.
b. Dimensi Sosial-Komunitas
   Kecamatan berfungsi sebagai simpul penguatan modal sosial, dengan mendorong partisipasi lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPMK. Program pemberdayaan harus diarahkan untuk menciptakan rasa kepemilikan bersama (sense of ownership) atas pembangunan.
c. Dimensi Ekonomi-Lingkungan
   Kecamatan juga menjadi ruang intervensi pembangunan ekonomi lokal, misalnya melalui dukungan UMKM, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan program keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Kecamatan Berdaya sekaligus selaras dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs).

Dari perspektif akademik, hal ini mencerminkan prinsip policy coherence, yakni keselarasan antara visi politik, kebijakan publik, dan implementasi teknis. Tanpa koherensi tersebut, pembangunan hanya berhenti pada tataran retorika. Kecamatan Berdaya menjadi bukti nyata bagaimana koherensi itu diciptakan.

Kecamatan sebagai unit pemerintahan lokal memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik tampil sebagai salah satu wilayah dengan potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis. Banyumanik tidak hanya berfungsi sebagai simpul administratif, melainkan juga sebagai ruang sosial tempat berinteraksi beragam kelompok dengan latar belakang agama, budaya, dan kelas sosial yang berbeda. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kerukunan umat beragama dan harmoni sosial di Banyumanik tidak bisa dilepaskan dari peran kecamatan sebagai mediator sekaligus fasilitator kehidupan bersama.

Kota Semarang menempati posisi yang relatif baik dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama. Indeks ini mengukur berbagai aspek, mulai dari kebebasan menjalankan ibadah, partisipasi antarumat beragama dalam kegiatan sosial, hingga tingkat konflik yang muncul akibat perbedaan keyakinan. Banyumanik, sebagai salah satu kecamatan di wilayah selatan Kota Semarang, memperlihatkan praktik nyata harmoni tersebut.

Karakteristik sosial Banyumanik ditandai dengan keberadaan komunitas multireligius: umat Islam sebagai mayoritas, disertai dengan komunitas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan. Berbagai rumah ibadah tersebar di wilayah ini, dari masjid besar yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, gereja-gereja di kawasan Pudakpayung dan Srondol, hingga vihara dan pura di beberapa kelurahan. Fakta ini menunjukkan adanya pluralitas yang membutuhkan

pengelolaan cermat untuk mencegah potensi gesekan sekaligus memaksimalkan peluang kolaborasi sosial.

Data indeks menunjukkan bahwa tingkat kerjasama antarumat beragama di Semarang, termasuk Banyumanik, cukup tinggi. Kehadiran forum-forum lintas agama, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif tokoh masyarakat menjadi modal sosial (social capital) yang berkontribusi signifikan dalam menjaga harmoni. Banyumanik menjadi contoh nyata bagaimana pluralisme dapat dikelola secara positif, bukan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai aset bersama.

Kerukunan beragama di Banyumanik tidak hanya berimplikasi pada stabilitas sosial, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan. Kehidupan yang harmonis mendorong terciptanya suasana kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, iklim investasi, dan pengembangan potensi masyarakat. Dalam perspektif akademis, kondisi ini sesuai dengan teori social cohesion (Chan, 2006), yang menekankan bahwa stabilitas sosial merupakan prasyarat utama bagi efektivitas kebijakan pembangunan.

Misalnya, kegiatan bersama seperti kerja bakti lintas agama, perayaan Hari Kemerdekaan, hingga musyawarah pembangunan kelurahan (musrenbang) menjadi arena perjumpaan yang melampaui batas identitas. Di sinilah harmoni menemukan bentuk praksisnya: warga tidak hanya berdampingan secara fisik, tetapi juga berbagi tujuan bersama. Pemerintah Kecamatan Banyumanik mengambil peran strategis sebagai fasilitator, memastikan bahwa setiap kelompok merasa diakui dan dihargai.

Meski harmoni di Banyumanik relatif terjaga, tantangan tetap ada. Pertama, risiko fragmentasi sosial akibat urbanisasi yang cepat. Banyumanik sebagai wilayah perbatasan dengan Ungaran dan menjadi jalur transit ke arah selatan, mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Perpindahan ini sering kali membawa keragaman baru yang, jika tidak dikelola, berpotensi menimbulkan eksklusi sosial.

Kedua, politisasi agama. Dalam momen politik, terutama menjelang pemilu, sentimen identitas kadang dieksploitasi untuk kepentingan elektoral. Hal ini bisa menodai relasi harmonis yang telah terbangun.

Ketiga, ketidaksetaraan ekonomi. Walaupun indeks harmoni menyoroti aspek sosial dan kultural, faktor ekonomi tetap berpengaruh. Kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu ketegangan, apalagi jika dilihat melalui lensa perbedaan kelompok. Oleh karena itu, menjaga harmoni berarti juga mengupayakan pemerataan pembangunan.

Dalam visi kepala daerah terpilih, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. dan H. Taj Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, konsep Kecamatan Berdaya menjadi platform utama pembangunan. Kecamatan diposisikan bukan sekadar sebagai unit birokrasi, melainkan sebagai motor penggerak partisipasi warga.

Dalam konteks Banyumanik, implementasi Kecamatan Berdaya selaras dengan upaya menjaga kerukunan umat beragama. Sebab, pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan harmoni sosial. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, maupun digitalisasi layanan publik harus sensitif terhadap keragaman warga. Dengan demikian, Kecamatan Berdaya bukan hanya tentang efisiensi birokrasi, tetapi juga tentang membangun ekosistem inklusif yang memfasilitasi kohesi sosial.

Untuk memastikan harmoni beragama diintegrasikan ke dalam pembangunan, Banyumanik perlu mengadopsi beberapa strategi:

Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat kecamatan. FKUB dapat difungsikan tidak hanya sebagai wadah mediasi,

tetapi juga sebagai laboratorium dialog sosial yang aktif menginisiasi program bersama lintas agama.

Mainstreaming toleransi dalam kebijakan pembangunan lokal. Setiap rencana kerja kecamatan perlu memasukkan perspektif keberagaman, misalnya dalam penyediaan ruang publik yang inklusif bagi seluruh komunitas.

Pemberdayaan masyarakat berbasis kerjasama lintas iman. Program UMKM, lingkungan, hingga pendidikan bisa didesain untuk melibatkan partisipasi lintas kelompok, sehingga kolaborasi menjadi kebiasaan.

Mitigasi risiko fragmentasi sosial. Kecamatan dapat berperan aktif dalam memetakan potensi konflik melalui survei sosial, kemudian melakukan langkah preventif sebelum ketegangan berkembang.

Jika dikelola secara konsisten, Banyumanik berpotensi menjadi model best practice bagi kecamatan lain, baik di Semarang maupun Jawa Tengah. Kombinasi antara harmoni sosial yang relatif stabil, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat menciptakan sebuah ekosistem yang kondusif.

Banyumanik bisa dipandang sebagai laboratorium sosial di mana teori pluralisme, social capital, dan governance menemukan relevansinya dalam konteks lokal. Banyumanik menunjukkan bahwa harmoni bukan sekadar retorika, tetapi bisa dioperasionalkan melalui kebijakan, program, dan partisipasi warga.

Posyandu, sebagai institusi pelayanan berbasis masyarakat, telah menjadi fondasi penting dalam sistem desentralisasi pelayanan publik di Indonesia. Sejak awal pembentukannya, Posyandu berfokus pada isu kesehatan ibu dan anak. Namun, dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2024, peran Posyandu diperluas untuk mendukung pencapaian 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Di Kecamatan Banyumanik, integrasi 6 SPM ke dalam Posyandu bukan hanya strategi administratif, tetapi juga bentuk inovasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat sekaligus memperluas makna pelayanan publik di tingkat paling dasar.

1. Pendidikan: Posyandu sebagai Arena Edukasi Keluarga
   SPM pendidikan menuntut pemerintah menyediakan akses pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Posyandu di Banyumanik mengisi celah ini melalui PAUD Holistik Integratif, kelas parenting, dan penyuluhan gizi yang juga berfungsi sebagai sarana edukasi nonformal. Dengan pendekatan ini, Posyandu bukan sekadar ruang medis, tetapi juga institusi pedagogis yang memperkuat fondasi literasi dan kesehatan anak.
   Peran ini sejalan dengan konsep community-based education, yakni pendidikan yang berakar pada komunitas dan memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sarana pembelajaran.

2. Kesehatan: Pilar Utama Posyandu
   SPM kesehatan tetap menjadi jantung fungsi Posyandu. Di Banyumanik, kegiatan rutin seperti imunisasi, deteksi dini stunting, penyuluhan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), serta penimbangan balita memperlihatkan kontribusi nyata terhadap kualitas kesehatan masyarakat.
   Lebih dari itu, Posyandu juga menjadi simpul kolaborasi dengan Puskesmas dalam pemantauan epidemi lokal, misalnya pencegahan DBD atau COVID-19. Hal ini menjadikan Posyandu instrumen vital dalam sistem kesehatan primer.

Hal ini memperlihatkan transformasi Posyandu sebagai grassroots health governance, yaitu tata kelola kesehatan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Edukasi Sanitasi dan Lingkungan Sekilas, SPM pekerjaan umum dan tata ruang tampak jauh dari fungsi Posyandu. Namun, di Banyumanik, Posyandu berperan dalam mengedukasi warga mengenai sanitasi lingkungan, drainase sehat, dan pengelolaan sampah rumah tangga.
   Kader Posyandu misalnya sering menyampaikan kampanye penggunaan jamban sehat atau pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman obat keluarga (TOGA). Secara filosofis, ini memperlihatkan bagaimana pelayanan publik teknis dapat dijembatani melalui institusi sosial-kultural yang berbasis masyarakat.
   Praktik ini mendukung environmental governance at micro-level, yakni tata kelola lingkungan yang dimulai dari level komunitas, bukan semata kebijakan makro.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Rumah Sehat Keluarga SPM perumahan menekankan pentingnya akses hunian layak. Posyandu di Banyumanik mendukung melalui edukasi tentang ventilasi, pencahayaan, pengelolaan air bersih, serta pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Program “Rumah Sehat Keluarga” yang digerakkan oleh kader PKK merupakan wujud konkret kontribusi Posyandu pada dimensi ini. Kontribusi Posyandu ini sejalan dengan konsep health in all policies (HiAP), yaitu kebijakan kesehatan yang diintegrasikan ke semua sektor, termasuk perumahan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   Posyandu di Banyumanik tidak hanya menangani isu medis, tetapi juga dilibatkan dalam kesiapsiagaan bencana. Misalnya, kader Posyandu menjadi agen komunikasi untuk peringatan dini banjir, longsor, atau kebakaran. Selain itu, Posyandu berfungsi sebagai pusat informasi sosial dalam melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dari perspektif tata kelola publik, ini memperlihatkan peran Posyandu sebagai hub komunitas untuk resilien masyarakat.

6. Sosial: Posyandu sebagai Ruang Solidaritas
   SPM sosial mengamanatkan layanan dasar untuk kelompok rentan dan miskin. Posyandu di Banyumanik sering menjadi wadah kegiatan donor darah, santunan anak yatim, hingga kelas keterampilan bagi ibu-ibu.
   Fungsi sosial ini menegaskan bahwa Posyandu bukan hanya institusi kesehatan, melainkan pusat solidaritas masyarakat, tempat di mana modal sosial (social capital) dibangun dan diperkuat.
   Penerapan 6 SPM melalui Posyandu dapat dipahami dalam kerangka holistic governance, yaitu pendekatan integratif di mana berbagai sektor pelayanan publik dijalankan dalam satu simpul kelembagaan berbasis komunitas. Banyumanik menjadi studi kasus menarik karena memperlihatkan bagaimana desentralisasi pelayanan publik tidak berarti fragmentasi, melainkan sinergi antar-sektor melalui unit paling dekat dengan masyarakat.

II.2.3 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik adalah isu strategis ke tujuh, yaitu “Penyelenggaraan Good Governance”. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Banyumanik, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Banyumanik, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Isu Strategis Kecamatan Banyumanik
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Banyumanik	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Banyumanik						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik
		belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik						peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Banyumanik

Sumber : Kecamatan Banyumanik 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Banyumanik dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal "Reformasi Birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi"; "Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan"; "Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan".

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah "**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**", dimana hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**.

III.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN BANYUMANIK

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :

“Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yaitu :

1. **“Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Banyumanik”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).

2. **“Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Banyumanik”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

III.2. SASARAN RENSTRA KECAMATAN BANYUMANIK

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dimana Kecamatan Banyumanik mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Banyumanik.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Banyumanik maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik**

   Dengan indikator sasaran yaitu :

   1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Banyumanik**.

      Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
   2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyumanik**

      Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Banyumanik**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Banyumanik**". Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan**

   Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik**". Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Banyumanik melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Banyumanik.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat												
	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik		**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Banyumanik**	**Angka**	**45.00**	**50.00**	**55.00**	**60.00**	**65.00**	**70.00**	**75.00**	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Banyumanik**	**Angka**	**72.60**	**76.00**	**76.50**	**77.00**	**77.50**	**78.00**	**78.50**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyumanik	**Angka**	**96.48**	**97.22**	**97.30**	**97.35**	**97.40**	**97.45**	**97.50**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET KINERJA						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Banyumanik	**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Banyumanik**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Banyumanik	**Angka**	**60.00**	**65.00**	**70.00**	**75.00**	**80.00**	**85.00**	**90.00**	
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang												
		SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik	**Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik**	**Angka**	**80.00**	**82.00**	**85.00**	**87.00**	**90.00**	**92.00**	**93.00**	

Sumber: Kecamatan Banyumanik 2025

III. 3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BANYUMANIK

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

III.3.1 STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2025-2029

STRATEGI	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Banyumanik	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik	√	√	√	√	√

Sumber: Kecamatan Banyumanik 2025

III.3.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 **Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Banyumanik**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Banyumanik;
(b) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Banyumanik;
(c) peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Banyumanik.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(d) peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Banyumanik;
(e) peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
(f) peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Banyumanik;
(g) peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Banyumanik;
(h) peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Banyumanik;
(i) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Banyumanik.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik;
(b) peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Banyumanik;
(c) peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik;
(d) peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Banyumanik.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Banyumanik	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Banyumanik	
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Banyumanik	
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Banyumanik	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Banyumanik	
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Banyumanik	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Banyumanik	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Banyumanik	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Banyumanik	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Banyumanik	

Sumber: Kecamatan Banyumanik 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Banyumanik	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Banyumanik
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Banyumanik
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Banyumanik
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Banyumanik	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Banyumanik
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Banyumanik
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Banyumanik
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Banyumanik
			6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Banyumanik
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumanik
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Banyumanik
			3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Banyumanik

Sumber: Kecamatan Banyumanik 2025

B A B IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN BANYUMANIK

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Banyumanik untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Banyumanik

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan**		**Camat**
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		S1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Banyumanik		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Banyumanik yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banyumanik beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik		
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Banyumanik	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik yang selesai ditindaklanjuti		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
		S2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Pemerintahan Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayanan Publik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Banyumanik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Banyumanik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Banyumanik)	Sekretaris/Staf Kelurahan Banyumanik

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Gedawang
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gedawang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gedawang)	Sekretaris/Staf Kelurahan Gedawang
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Jabungan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jabungan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jabungan)	Sekretaris/Staf Kelurahan Jabungan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Ngesrep
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngesrep)	Sekretaris/Staf Kelurahan Ngesrep

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan Kelurahan Ngesrep		
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Padangsari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Padangsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Padangsari)	Sekretaris/Staf Kelurahan Padangsari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Pedalangan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pedalangan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedalangan)	Sekretaris/Staf Kelurahan Pedalangan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Pudakpayung

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pudakpayung	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pudakpayung)	Sekretaris/Staf Kelurahan Pudakpayung
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Srondol Kulon
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Srondol Kulon	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Srondol Kulon)	Sekretaris/Staf Kelurahan Srondol Kulon
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Srondol Wetan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Srondol Wetan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Srondol Wetan)	Sekretaris/Staf Kelurahan Srondol Wetan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Sumurboto

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sumurboto	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumurboto)	Sekretaris/Staf Kelurahan Sumurboto
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Tinjomoyo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tinjomoyo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tinjomoyo)	Sekretaris/Staf Kelurahan Tinjomoyo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Pembangunan Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Banyumanik
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Banyumanik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Banyumanik)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Banyumanik
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurag Gedawang
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gedawang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gedawang)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Gedawang
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Jabungan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Jabungan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jabungan)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Jabungan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Ngesrep
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Ngesrep	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngesrep)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Ngesrep
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Padangsari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Padangsari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Padangsari)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Padangsari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Lurah Pedalangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pelaksanaan tugas kewenangan camat	Dilimpahkan kepada Camat	Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pedalangan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pedalangan)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Pedalangan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pudakpayung
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pudakpayung	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pudakpayung)	Kepala Seksi /Staf Pembangunan Kelurahan Pudakpayung
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Srondol Kulon
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Srondol Kulon	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Srondol Kulon)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Srondol Kulon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Srondol Wetan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Srondol Wetan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Srondol Wetan)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Srondol Wetan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Sumurboto
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Sumurboto	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Sumurboto)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Sumurboto
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tinjomoyo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kewenangan camat			
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Tinjomoyo	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tinjomoyo)	Kepala Seksi Pembangunan /Staf Kelurahan Tinjomoyo
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
					Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan		
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang		S3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Pembangunan Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Banyumanik
				Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kepala Seksi Perekonomian dan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banyumanik	Kelurahan (Kelurahan Banyumanik)	Kesejahteraan Sosial/Staf Kelurahan Banyumanik
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Gedawang
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedawang	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gedawang)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial/Staf Kelurahan Gedawang
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Jabungan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jabungan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jabungan)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial/Staf Kelurahan Jabungan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Ngesrep
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngesrep	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngesrep)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial/Staf

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Kelurahan Ngesrep
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Padangsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padangsari	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Padangsari)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial/Staf Kelurahan Padangsari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Pedalangan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pedalangan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedalangan)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial/Staf Kelurahan Pedalangan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Pudakpayung
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pudakpayung	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pudakpayung)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial/Staf

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Kelurahan Pudakpayung
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Srondol Kulon
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Srondol Kulon	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Srondol Kulon)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial/Staf Kelurahan Srondol Kulon
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Srondol Wetan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Srondol Wetan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Srondol Wetan)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial/Staf Kelurahan Srondol Wetan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Sumurboto
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sumurboto)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurboto		Sosial/Staf Kelurahan Sumurboto
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lurah Tinjomoyo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tinjomoyo	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tinjomoyo)	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial/Staf Kelurahan Tinjomoyo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Banyumanik
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Banyumanik)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Banyumanik

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Gedawang
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Gedawang	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gedawang)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Gedawang
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Jabungan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Jabungan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jabungan)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Jabungan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Ngesrep
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ngesrep	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngesrep)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Ngesrep

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Padangsari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Padangsari	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Padangsari)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Padangsari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pedalangan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pedalangan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pedalangan)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Pedalangan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pudakpayung
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pudakpayung	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pudakpayung)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Pudakpayung

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Srondol Kulon
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Srondol Kulon	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Srondol Kulon)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Srondol Kulon
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Srondol Wetan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Srondol Wetan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Srondol Wetan)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Srondol Wetan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Sumurboto
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sumurboto	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sumurboto)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Sumurboto

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tinjomoyo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Tinjomoyo	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tinjomoyo)	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Tinjomoyo
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Sumber: Kecamatan Banyumanik 2025

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan**	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik**		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	**Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan**	**Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3	**Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)**	**Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib**		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	**Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5	**Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil**			
7.	**Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi**			
8.	**Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK**			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber: Kecamatan Banyumanik 2025

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Banyumanik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana

program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 - 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN BANYUMANIK				**69.513.610.249**		**71.416.521.341**		**73.368.637.253**		**75.404.892.063**		**77.486.486.228**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**20.834.653.858**		**21.773.639.823**		**22.742.552.103**		**23.775.939.206**		**24.834.608.320**	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Banyumanik yang berkualitas**	**100,00%**	**100,00%**	**20.834.653.858**	**100,00%**	**21.773.639.823**	**100,00%**	**22.742.552.103**	**100,00%**	**23.775.939.206**	**100,00%**	**24.834.608.320**	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	**96,00%**	**96,33%**		**97,00%**		**97,33%**		**97,67%**		**98,00%**		
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**111.561.560**		**115.319.612**		**118.694.778**		**120.235.028**		**122.472.167**	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banyumanik beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00%**	**100,00%**	**111.561.560**	**100,00%**	**115.319.612**	**100,00%**	**118.694.778**	**100,00%**	**120.235.028**	**100,00%**	**122.472.167**	
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				53.383.536		54.451.207		55.540.231		56.651.035		57.784.056	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	53.383.536	4 Dokumen	54.451.207	4 Dokumen	55.540.231	6 Dokumen	56.651.035	4 Dokumen	57.784.056	Kecamatan Banyumanik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.975.536		2.015.047		2.055.348		2.096.455		2.138.384	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.975.536	1 Dokumen	2.015.047	1 Dokumen	2.055.348	1 Dokumen	2.096.455	1 Dokumen	2.138.384	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.581.416		2.633.044		2.685.705		2.739.419		2.794.208	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.581.416	1 Dokumen	2.633.044	1 Dokumen	2.685.705	1 Dokumen	2.739.419	1 Dokumen	2.794.208	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.363.536		1.390.807		1.418.623		1.446.995		1.475.935	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.363.536	1 Dokumen	1.390.807	1 Dokumen	1.418.623	1 Dokumen	1.446.995	1 Dokumen	1.475.935	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				894.000		938.700		976.248		981.129		997.808	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	1 Dokumen	938.700	1 Dokumen	976.248	1 Dokumen	981.129	1 Dokumen	997.808	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.363.536		1.390.807		1.418.623		1.446.995		1.475.935	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	5 Laporan	1.363.536	5 Laporan	1.390.807	5 Laporan	1.418.623	5 Laporan	1.446.995	5 Laporan	1.475.935	Kecamatan Banyumanik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		52.500.000		54.600.000		54.873.000		55.805.841	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	54.600.000	1 Dokumen	54.873.000	1 Dokumen	55.805.841	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**17.465.906.235**		**666.493.558**		**19.215.509.850**		**20.155.853.957**		**21.142.807.008**	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan**	**100,00%**	**100,00%**	**17.465.906.235**	**100,00%**	**666.493.558**	**100,00%**	**19.215.509.850**	**100,00%**	**20.155.853.957**	**100,00%**	**21.142.807.008**	
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.812.481.179		17.653.069.278		18.535.686.422		19.462.434.061		20.435.518.714	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	93 Orang	104 Orang	16.812.481.179	104 Orang	17.653.069.278	104 Orang	18.535.686.422	104 Orang	19.462.434.061	104 Orang	20.435.518.714	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				645.243.840		658.148.717		671.311.691		684.737.925		698.432.683	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	645.243.840	12 Dokumen	658.148.717	12 Dokumen	671.311.691	12 Dokumen	684.737.925	12 Dokumen	698.432.683	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.363.536		1.390.807		1.418.623		1.446.995		1.475.935	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	1.363.536	1 Laporan	1.390.807	1 Laporan	1.418.623	1 Laporan	1.446.995	1 Laporan	1.475.935	Kecamatan Banyumanik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)												
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.454.144		5.563.227		5.674.491		5.787.981		5.903.741	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	5.454.144	12 Laporan	5.563.227	12 Laporan	5.674.491	12 Laporan	5.787.981	12 Laporan	5.903.741	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.363.536		1.390.807		1.418.623		1.446.995		1.475.935	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.363.536	1 Dokumen	1.390.807	1 Dokumen	1.418.623	1 Dokumen	1.446.995	1 Dokumen	1.475.935	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**57.200.379**		**59.448.398**		**61.410.174**		**62.035.587**		**63.155.138**	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Banyumanik	**Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Banyumanik**	**88 Aangka**	**89 Angka**	**57.200.379**	**91 Angka**	**59.448.398**	**92 Angka**	**61.410.174**	**93 Angka**	**62.035.587**	**94 Angka**	**63.155.138**	
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.400.000		20.808.000		21.224.160		21.648.643		22.081.616	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	20.400.000	4 Dokumen	20.808.000	4 Dokumen	21.224.160	4 Dokumen	21.648.643	4 Dokumen	22.081.616	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				36.800.379		38.640.398		40.186.014		40.386.944		41.073.522	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	352	370	36.800.379	370	38.640.398	370	40.186.014	370	40.386.944	370	41.073.522	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				**934.979.745**		**953.679.340**		**972.752.927**		**992.207.986**		**1.012.052.145**	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik**	**100,00%**	**100,00%**	**934.979.745**	**100,00%**	**953.679.340**	**100,00%**	**972.752.927**	**100,00%**	**992.207.986**	**100,00%**	**1.012.052.145**	**Kecamatan Banyumanik**
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61.200.000		62.424.000		63.672.480		64.945.930		66.244.848	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10 Paket	11 Paket	61.200.000	12 Paket	62.424.000	13 Paket	63.672.480	14 Paket	64.945.930	15 Paket	66.244.848	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.328.097		21.754.659		22.189.752		22.633.547		23.086.218	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	5 Paket	21.328.097	6 Paket	21.754.659	7 Paket	22.189.752	8 Paket	22.633.547	9 Paket	23.086.218	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.200.000		10.404.000		10.612.080		10.824.322		11.040.808	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7 Laporan	8 Laporan	10.200.000	9 Laporan	10.404.000	10 Laporan	10.612.080	11 Laporan	10.824.322	12 Laporan	11.040.808	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				360.259.808		367.465.004		374.814.304		382.310.590		389.956.802	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15 Laporan	16 Laporan	360.259.808	17 Laporan	367.465.004	18 Laporan	374.814.304	19 Laporan	382.310.590	20 Laporan	389.956.802	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				481.991.840		491.631.677		501.464.311		511.493.597		521.723.469	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	5 Dokumen	481.991.840	6 Dokumen	491.631.677	7 Dokumen	501.464.311	8 Dokumen	511.493.597	9 Dokumen	521.723.469	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**560.104.752**		**571.306.847**		**582.732.984**		**594.387.644**		**606.275.397**	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik**	**100,00%**	**100,00%**	**560.104.752**	**100,00%**	**571.306.847**	**100,00%**	**582.732.984**	**100,00%**	**594.387.644**	**100,00%**	**606.275.397**	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				560.104.752		571.306.847		582.732.984		594.387.644		606.275.397	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10 Unit	11 Unit	560.104.752	12 Unit	571.306.847	13 Unit	582.732.984	14 Unit	594.387.644	15 Unit	606.275.397	Kecamatan Banyumanik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.062.932.912**		**1.084.191.570**		**1.105.875.401**		**1.127.992.910**		**1.150.552.767**	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Banyumanik	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Banyumanik yang selesai ditindaklanjuti**	**100,00%**	**100,00%**	**1.062.932.912**	**100,00%**	**1.084.191.570**	**100,00%**	**1.105.875.401**	**100,00%**	**1.127.992.910**	**100,00%**	**1.127.992.910**	
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				215.220.000		219.524.400		223.914.888		228.393.186		232.961.049	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	215.220.000	12 Laporan	219.524.400	12 Laporan	223.914.888	12 Laporan	228.393.186	12 Laporan	232.961.049	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				847.712.912		864.667.170		881.960.513		899.599.724		917.591.718	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	847.712.912	12 Laporan	864.667.170	12 Laporan	881.960.513	12 Laporan	899.599.724	12 Laporan	917.591.718	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**641.968.275**		**670.131.220**		**685.575.989**		**723.226.094**		**737.293.698**	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik sesuai ketentuan**	**100,00%**	**100,00%**	**641.968.275**	**100,00%**	**670.131.220**	**100,00%**	**685.575.989**	**100,00%**	**723.226.094**	**100,00%**	**737.293.698**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				271.237.275		276.662.020		282.195.261		287.839.166		293.595.949	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	42 Unit	271.237.275	42 Unit	276.662.020	42 Unit	282.195.261	42 Unit	287.839.166	42 Unit	293.595.949	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.131.000		102.157.200		106.243.488		132.305.923		134.555.124	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	85.131.000	35 Unit	102.157.200	37 Unit	106.243.488	40 Unit	132.305.923	42 Unit	134.555.124	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.600.000		291.312.000		297.138.240		303.081.005		309.142.625	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	285.600.000	2 Unit	291.312.000	2 Unit	297.138.240	2 Unit	303.081.005	2 Unit	309.142.625	Kecamatan Banyumanik
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**4.081.633.826**		**4.163.266.502**		**4.246.531.832**		**4.331.462.471**		**4.418.091.718**	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu**	**100,00%**	**100,00%**	**4.081.633.826**	**100,00%**	**4.163.266.502**	**100,00%**	**4.246.531.832**	**100,00%**	**4.331.462.471**	**100,00%**	**4.418.091.718**	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**145.885.500**		**148.803.210**		**151.779.274**		**154.814.859**		**157.911.157**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait**	**100,00%**	**100,00 %**	**145.885.500**	**100,00%**	**148.803.210**	**100,00%**	**151.779.274**	**100,00%**	**154.814.859**	**100,00%**	**157.911.157**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6.732.000		6.866.640		7.003.973		7.144.052		7.286.933	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	1 Laporan	6.732.000	1 Laporan	6.866.640	1 Laporan	7.003.973	1 Laporan	7.144.052	1 Laporan	7.286.933	Kecamatan Banyumanik
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100,00%**	**100,00 %**	**139.153.500**	**100,00%**	**141.936.570**	**100,00%**	**144.775.301**	**100,00%**	**147.670.807**	**100,00%**	**150.624.224**	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				139.153.500		141.936.570		144.775.301		147.670.807		150.624.224	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	139.153.500	1 Dokumen	141.936.570	1 Dokumen	144.775.301	1 Dokumen	147.670.807	1 Dokumen	150.624.224	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				**2.035.638.337**		**2.076.351.104**		**2.117.878.126**		**2.160.235.689**		**2.203.440.403**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100,00%**	**100,00 %**	**2.035.638.337**	**100,00%**	**2.076.351.104**	**100,00%**	**2.117.878.126**	**100,00%**	**2.160.235.689**	**100,00%**	**2.203.440.403**	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				955.458.337		974.567.504		994.058.854		1.013.940.031		1.034.218.832	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	955.458.337	12 Laporan	974.567.504	12 Laporan	994.058.854	12 Laporan	1.013.940.031	12 Laporan	1.034.218.832	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				93.840.000		95.716.800		97.631.136		99.583.759		101.575.434	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.840.000	12 Laporan	95.716.800	12 Laporan	97.631.136	12 Laporan	99.583.759	12 Laporan	101.575.434	Kelurahan Banyumanik
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.880.000		97.797.600		99.753.552		101.748.623		103.783.596	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.880.000	12 Laporan	97.797.600	12 Laporan	99.753.552	12 Laporan	101.748.623	12 Laporan	103.783.596	Kelurahan Gedawang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				89.760.000		91.555.200		93.386.304		95.254.030		97.159.111	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	89.760.000	12 Laporan	91.555.200	12 Laporan	93.386.304	12 Laporan	95.254.030	12 Laporan	97.159.111	Kelurahan Jabungan
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.940.000		100.918.800		102.937.176		104.995.920		107.095.838	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	98.940.000	12 Laporan	100.918.800	12 Laporan	102.937.176	12 Laporan	104.995.920	12 Laporan	107.095.838	Kelurahan Ngesrep
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.000.000		104.040.000		106.120.800		108.243.216		110.408.080	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	102.000.000	12 Laporan	104.040.000	12 Laporan	106.120.800	12 Laporan	108.243.216	12 Laporan	110.408.080	Kelurahan Padangsari
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				96.900.000		98.838.000		100.814.760		102.831.055		104.887.676	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	96.900.000	12 Laporan	98.838.000	12 Laporan	100.814.760	12 Laporan	102.831.055	12 Laporan	104.887.676	Kelurahan Pedalangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				109.140.000		111.322.800		113.549.256		115.820.241		118.136.646	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	109.140.000	12 Laporan	111.322.800	12 Laporan	113.549.256	12 Laporan	115.820.241	12 Laporan	118.136.646	Kelurahan Pudakpayung
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.880.000		97.797.600		99.753.552		101.748.623		103.783.596	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.880.000	12 Laporan	97.797.600	12 Laporan	99.753.552	12 Laporan	101.748.623	12 Laporan	103.783.596	Kelurahan Srondol Kulon
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				107.100.000		109.242.000		111.426.840		113.655.377		115.928.484	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	107.100.000	12 Laporan	109.242.000	12 Laporan	111.426.840	12 Laporan	113.655.377	12 Laporan	115.928.484	Kelurahan Srondol Wetan
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				97.920.000		99.878.400		101.875.968		103.913.487		105.991.757	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	97.920.000	12 Laporan	99.878.400	12 Laporan	101.875.968	12 Laporan	103.913.487	12 Laporan	105.991.757	Kelurahan Sumurboto

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				92.820.000		94.676.400		96.569.928		98.501.327		100.471.353	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	92.820.000	12 Laporan	94.676.400	12 Laporan	96.569.928	12 Laporan	98.501.327	12 Laporan	100.471.353	Kelurahan Tinjomoyo
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**1.900.109.989**		**1.938.112.188**		**1.976.874.432**		**2.016.411.923**		**2.056.740.158**	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100,00%**	**100,00 %**	**1.900.109.989**	**100,00%**	**1.938.112.188**	**100,00%**	**1.976.874.432**	**100,00%**	**2.016.411.923**	**100,00%**	**2.056.740.158**	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.563.509.989		1.594.780.188		1.626.675.792		1.659.209.308		1.692.393.494	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1.563.509.989	12 Laporan	1.594.780.188	12 Laporan	1.626.675.792	12 Laporan	1.659.209.308	12 Laporan	1.692.393.494	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Banyumanik
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Gedawang
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Jabungan
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Ngesrep
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Padangsari
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Pedalangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Pudakpayung
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Srondol Kulon
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.600.000		31.212.000	12 Laporan	31.836.240		32.472.965		33.122.424	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Srondol Wetan
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Sumurboto
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		33.122.424	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	31.212.000	12 Laporan	31.836.240	12 Laporan	32.472.965	12 Laporan	33.122.424	Kelurahan Tinjomoyo
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**46.359.000**		**47.286.180**		**48.231.904**		**49.196.542**		**50.180.473**	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik**	**100,00%**	**100,00%**	**46.359.000**	**100,00%**	**47.286.180**	**100,00%**	**48.231.904**	**100,00%**	**49.196.542**	**100,00%**	**50.180.473**	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**46.359.000**		**47.286.180**		**48.231.904**		**49.196.542**		**50.180.473**	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**46.359.000**	**12 Kegiatan**	**47.286.180**	**12 Kegiatan**	**48.231.904**	**12 Kegiatan**	**49.196.542**	**12 Kegiatan**	**50.180.473**	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				46.359.000		47.286.180		48.231.904		49.196.542		50.180.473	
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	46.359.000	12 Laporan	47.286.180	12 Laporan	48.231.904	12 Laporan	49.196.542	12 Laporan	50.180.473	Kecamatan Banyumanik
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**228.072.000**		**232.633.440**		**237.286.109**		**242.031.831**		**246.872.468**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik**	**80,00%**	**82,00%**	**228.072.000**	**82,00%**	**232.633.440**	**82,00%**	**237.286.109**	**82,00%**	**242.031.831**	**82,00%**	**246.872.468**	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**228.072.000**		**232.633.440**		**237.286.109**		**242.031.831**		**246.872.468**	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**228.072.000**	**2 Kegiatan**	**232.633.440**	**2 Kegiatan**	**237.286.109**	**2 Kegiatan**	**242.031.831**	**2 Kegiatan**	**246.872.468**	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				228.072.000		232.633.440		237.286.109		242.031.831		246.872.468	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	228.072.000	200 Orang	232.633.440	200 Orang	237.286.109	200 Orang	242.031.831	200 Orang	246.872.468	Kecamatan Banyumanik
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**44.322.891.565**		**45.199.695.396**		**46.094.035.305**		**47.006.262.013**		**47.936.733.249**	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik**	**100,00%**	**100,00%**	**44.322.891.565**	**100,00%**	**45.199.695.396**	**100,00%**	**46.094.035.305**	**100,00%**	**47.006.262.013**	**100,00%**	**47.936.733.249**	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**45.900.000**		**46.818.000**		**47.754.360**		**48.709.447**		**49.683.636**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	**Jumlah laporan hasil musrenbang**	**15 Laporan**	**15 Laporan**	**45.900.000**	**15 Laporan**	**46.818.000**	**15 Laporan**	**47.754.360**	**15 Laporan**	**48.709.447**	**15 Laporan**	**49.683.636**	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				45.900.000		46.818.000		47.754.360		48.709.447		49.683.636	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.900.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	46.818.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	47.754.360	6 Lembaga Kemasyarakatan	48.709.447	6 Lembaga Kemasyarakatan	49.683.636	Kecamatan Banyumanik
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**502 Kegiatan**	**142 Kegiatan**	**1.652.028.000**	**144 Kegiatan**	**1.675.414.560**	**146 Kegiatan**	**1.699.268.853**	**148 Kegiatan**	**1.723.600.230**	**150 Kegiatan**	**1.748.418.232**	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				482.700.000		482.700.000		482.700.000		482.700.000		482.700.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	482.700.000	6 Pokmas/ Ormas	482.700.000	6 Pokmas/ Ormas	482.700.000	6 Pokmas/ Ormas	482.700.000	6 Pokmas/ Ormas	482.700.000	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				93.840.000		95.716.800		97.631.136		99.583.759		101.575.434	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	93.840.000	6 Pokmas/ Ormas	95.716.800	6 Pokmas/ Ormas	97.631.136	6 Pokmas/ Ormas	99.583.759	6 Pokmas/ Ormas	101.575.434	Kelurahan Banyumanik
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				102.408.000		104.456.160		106.545.283		108.676.189		110.849.713	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	102.408.000	6 Pokmas/ Ormas	104.456.160	6 Pokmas/ Ormas	106.545.283	6 Pokmas/ Ormas	108.676.189	6 Pokmas/ Ormas	110.849.713	Kelurahan Gedawang
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				85.272.000		86.977.440		88.716.989		90.491.329		92.301.155	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	85.272.000	6 Pokmas/ Ormas	86.977.440	6 Pokmas/ Ormas	88.716.989	6 Pokmas/ Ormas	90.491.329	6 Pokmas/ Ormas	92.301.155	Kelurahan Jabungan
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				106.692.000		108.825.840		111.002.357		113.222.404		115.486.852	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	106.692.000	6 Pokmas/ Ormas	108.825.840	6 Pokmas/ Ormas	111.002.357	6 Pokmas/ Ormas	113.222.404	6 Pokmas/ Ormas	115.486.852	Kelurahan Ngesrep
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119.544.000		121.934.880		124.373.578		126.861.049		129.398.270	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	119.544.000	6 Pokmas/ Ormas	121.934.880	6 Pokmas/ Ormas	124.373.578	6 Pokmas/ Ormas	126.861.049	6 Pokmas/ Ormas	129.398.270	Kelurahan Padangsari
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				85.272.000		86.977.440		88.716.989		90.491.329		92.301.155	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	85.272.000	6 Pokmas/ Ormas	86.977.440	6 Pokmas/ Ormas	88.716.989	6 Pokmas/ Ormas	90.491.329	6 Pokmas/ Ormas	92.301.155	Kelurahan Pedalangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				166.668.000		170.001.360		173.401.387		176.869.415		180.406.803	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	166.668.000	6 Pokmas/ Ormas	170.001.360	6 Pokmas/ Ormas	173.401.387	6 Pokmas/ Ormas	176.869.415	6 Pokmas/ Ormas	180.406.803	Kelurahan Pudakpayung
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				98.124.000		100.086.480		102.088.210		104.129.974		106.212.573	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	98.124.000	6 Pokmas/ Ormas	100.086.480	6 Pokmas/ Ormas	102.088.210	6 Pokmas/ Ormas	104.129.974	6 Pokmas/ Ormas	106.212.573	Kelurahan Srondol Kulon
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				149.532.000		152.522.640		155.573.093		158.684.555		161.858.246	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	149.532.000	6 Pokmas/ Ormas	152.522.640	6 Pokmas/ Ormas	155.573.093	6 Pokmas/ Ormas	158.684.555	6 Pokmas/ Ormas	161.858.246	Kelurahan Srondol Wetan
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				76.704.000		78.238.080		79.802.842		81.398.898		83.026.876	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	76.704.000	6 Pokmas/ Ormas	78.238.080	6 Pokmas/ Ormas	79.802.842	6 Pokmas/ Ormas	81.398.898	6 Pokmas/ Ormas	83.026.876	Kelurahan Sumurboto

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				85.272.000		86.977.440		88.716.989		90.491.329		92.301.155	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	85.272.000	6 Pokmas/ Ormas	86.977.440	6 Pokmas/ Ormas	88.716.989	6 Pokmas/ Ormas	90.491.329	6 Pokmas/ Ormas	92.301.155	Kelurahan Tinjomoyo
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**42.381.591.565**		**43.229.223.396**		**44.093.807.863**		**44.975.684.023**		**45.875.197.701**	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya**	**18 Dokumen**	**4 Laporan**	**42.381.591.565**	**4 Laporan**	**43.229.223.396**	**4 Laporan**	**44.093.807.863**	**4 Laporan**	**44.975.684.023**	**4 Laporan**	**45.875.197.701**	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				139.740.000		142.534.800		145.385.496		148.293.206		151.259.070	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4 Lembaga	139.740.000	4 Lembaga	142.534.800	4 Lembaga	145.385.496	4 Lembaga	148.293.206	4 Lembaga	151.259.070	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.792.658.000		2.848.511.160		2.905.481.383		2.963.591.011		3.022.862.831	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	2.792.658.000	6 Lembaga	2.848.511.160	6 Lembaga	2.905.481.383	6 Lembaga	2.963.591.011	6 Lembaga	3.022.862.831	Kelurahan Banyumanik
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.493.693.800		3.563.567.676		3.634.839.030		3.707.535.810		3.781.686.526	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	3.493.693.800	6 Lembaga	3.563.567.676	6 Lembaga	3.634.839.030	6 Lembaga	3.707.535.810	6 Lembaga	3.781.686.526	Kelurahan Gedawang
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.917.807.060		1.956.163.201		1.995.286.465		2.035.192.195		2.075.896.038	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	1.917.807.060	6 Lembaga	1.956.163.201	6 Lembaga	1.995.286.465	6 Lembaga	2.035.192.195	6 Lembaga	2.075.896.038	Kelurahan Jabungan
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.109.437.353		4.191.626.100		4.275.458.622		4.360.967.795		4.448.187.150	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	4.109.437.353	6 Lembaga	4.191.626.100	6 Lembaga	4.275.458.622	6 Lembaga	4.360.967.795	6 Lembaga	4.448.187.150	Kelurahan Ngesrep
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.866.345.946		4.963.672.865		5.062.946.322		5.164.205.249		5.267.489.354	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	4.866.345.946	6 Lembaga	4.963.672.865	6 Lembaga	5.062.946.322	6 Lembaga	5.164.205.249	6 Lembaga	5.267.489.354	Kelurahan Padangsari
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.390.676.095		3.458.489.617		3.527.659.409		3.598.212.597		3.670.176.849	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	3.390.676.095	6 Lembaga	3.458.489.617	6 Lembaga	3.527.659.409	6 Lembaga	3.598.212.597	6 Lembaga	3.670.176.849	Kelurahan Pedalangan
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				7.245.451.468		7.390.360.497		7.538.167.707		7.688.931.061		7.842.709.683	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	7.245.451.468	6 Lembaga	7.390.360.497	6 Lembaga	7.538.167.707	6 Lembaga	7.688.931.061	6 Lembaga	7.842.709.683	Kelurahan Pudakpayung
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.412.844.889		3.481.101.787		3.550.723.823		3.621.738.299		3.694.173.065	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	3.412.844.889	6 Lembaga	3.481.101.787	6 Lembaga	3.550.723.823	6 Lembaga	3.621.738.299	6 Lembaga	3.694.173.065	Kelurahan Srondol Kulon
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				6.396.976.885		6.524.916.423		6.655.414.751		6.788.523.047		6.924.293.507	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	6.396.976.885	6 Lembaga	6.524.916.423	6 Lembaga	6.655.414.751	6 Lembaga	6.788.523.047	6 Lembaga	6.924.293.507	Kelurahan Srondol Wetan
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.270.948.786		2.316.367.761		2.362.695.116		2.409.949.019		2.458.147.999	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	2.270.948.786	6 Lembaga	2.316.367.761	6 Lembaga	2.362.695.116	6 Lembaga	2.409.949.019	6 Lembaga		Kelurahan Sumurboto
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.345.011.283		2.391.911.509		2.439.749.739		2.488.544.734		2.538.315.629	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Banyumanik	9 Lembaga	6 Lembaga	2.345.011.283	6 Lembaga	2.391.911.509	6 Lembaga	2.439.749.739	6 Lembaga	2.488.544.734	6 Lembaga	2.538.315.629	Kelurahan Tinjomoyo
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	**Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan**	**100,00%**	**100,00 %**	**15.300.000**	**100,00%**	**15.606.000**	**100,00%**	**15.918.120**	**100,00%**	**16.236.482**	**100,00%**	**16.561.212**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				15.300.000		15.606.000		15.918.120		16.236.482		16.561.212	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.300.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.606.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.918.120	1 Lembaga Kemasyarakatan	16.236.482	1 Lembaga Kemasyarakatan	16.561.212	Kecamatan Banyumanik
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	**Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	**100,00%**	**100,00 %**	**228.072.000**	**100,00%**	**232.633.440**	**100,00%**	**237.286.109**	**100,00%**	**242.031.831**	**100,00%**	**246.872.468**	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				228.072.000		232.633.440		237.286.109		242.031.831		246.872.468	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	228.072.000	12 Laporan	232.633.440	12 Laporan	237.286.109	12 Laporan	242.031.831	12 Laporan	246.872.468	Kecamatan Banyumanik

Sumber: Kecamatan Banyumanik 2025

Tabel 4.4
PROYEKSI PENDAPATAN RETRIBUSI TAHUN 2025-2030 KECAMATAN BANYUMANIK

KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	**Retribusi Jasa Usaha**	28.000.000	29.960.000	32.057.200	34.301.204	36.702.288	39.271.448
	TOTAL	**Rp 28.000.000**	**Rp 29.960.000**	**Rp 32.057.200**	**Rp 34.301.204**	**Rp 36.702.288**	**Rp 39.271.448**

Sumber: Kecamatan Banyumanik 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyumanik yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Kinerja layanan Kecamatan Banyumanik	Angka	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	
Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan	Angka	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	
Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	82.00	85.00	87.00	90.00	92.00	93.00	

Sumber : Kecamatan Banyumanik 2025

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Unsur Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Tahun 2025 - 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Banyumanik 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan unsur penunjang kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Permasalahan belum optimalnya kualitas kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pemerintahan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

49. KECAMATAN NGALIYAN

BABI
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka Kecamatan Ngaliyan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dari pelantikan Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Kecamatan Ngaliyan, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Ngaliyan Kota Semarang.

Gambar 0.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

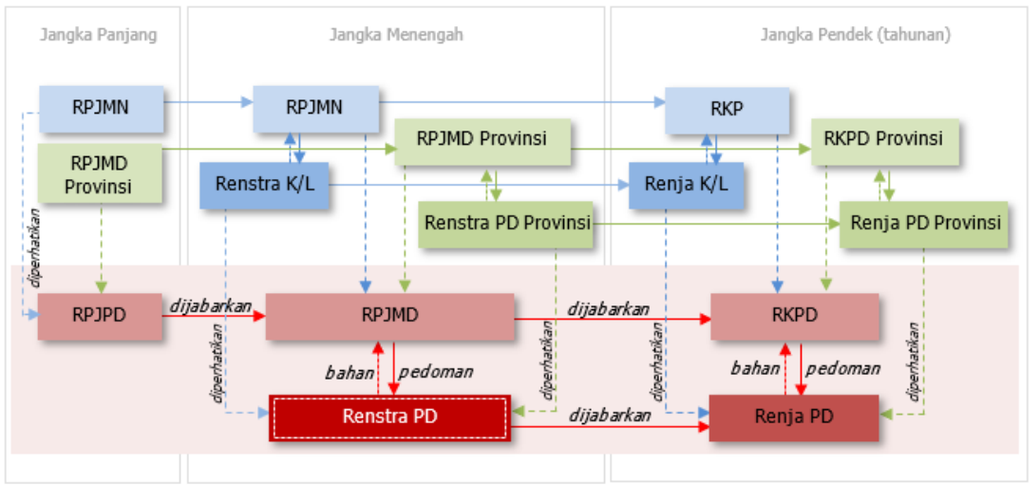

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
25. Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Ngaliyan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ngaliyan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngaliyan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Ngaliyan. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Ngaliyan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Ngaliyan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ngaliyan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Ngaliyan bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang kewilayahan, dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, tugas pokok dari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Ngaliyan mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan;
i. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
k. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
m. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

n. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu – isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ngaliyan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a) Camat
Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.
Sekretariat terdiri atas :
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan.

d) Seksi Pembangunan
Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan.

e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

f) Seksi Pelayanan Publik
Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi

Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelayanan Publik.

g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

h) Jabatan Fungsional
Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

i) Lurah
Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j) Sekretariat Kelurahan
Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

k) Seksi Pembangunan Kelurahan
Seksi Pembangunan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pembangunan di wilayah Kelurahan.

l) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kelurahan.

m) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan.

Selain jabatan-jabatan struktural yang telah dijelaskan, terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Camat Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Susunan organisasi berikut dengan uraian tugas dari setiap unsur organisasi menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya struktur ini diharapkan kinerja aparatur dapat lebih terarah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Pada level kelurahan, organisasi dipimpin oleh Lurah yang membawahi Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional, serta tiga seksi, yaitu Seksi Pembangunan; Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; serta Seksi Pemerintahan, Ketertiban, dan Ketentraman Umum. Pembagian unsur organisasi ini dimaksudkan untuk memastikan setiap bidang pelayanan dapat berjalan sesuai fungsi masing-masing, baik dalam urusan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai susunan perangkat tersebut, bagan organisasi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

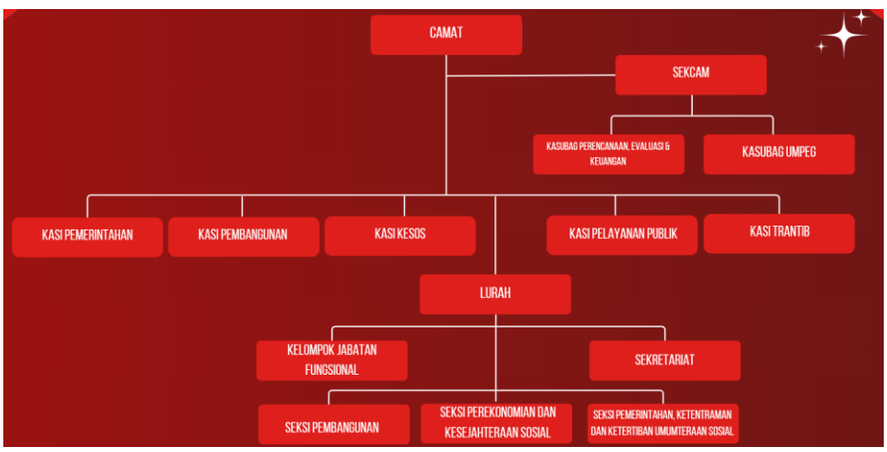

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Ngaliyan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan,

uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Ngaliyan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

a. perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
e. penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
f. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
g. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
h. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
j. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
k. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
l. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
m. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
n. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
o. penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
p. penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
q. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
r. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
d. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
g. pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
h. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
i. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
j. pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
m. pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
o. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
q. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
r. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
s. pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
t. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;

u. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
v. pelaksanaan administrasi umum Kecamatan; pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
w. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
x. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
y. pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
z. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
å. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
ä. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
ö. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
e. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
f. Menyiapkan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, antara lain: Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan
g. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan, Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan
h. Menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
i. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota
j. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
k. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan
l. Menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Kecamatan
m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan
n. Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan

o. Menyiapkan kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara
p. Menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah
q. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Kecamatan
r. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah Kecamatan
s. Menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Kecamatan
t. Menyiapkan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Kecamatan
u. Menyiapkan kegiatan pengelolaan, penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Kecamatan
v. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Kecamatan
w. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kecamatan
x. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
y. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran Kecamatan
z. Menyiapkan kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Kecamatan
å. Menyiapkan kegiatan penyusunan manajemen resiko dan rencana tindak pengendalian
ä. Menyiapkan kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan
ö. Menyiapkan kegiatan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan
aa. Menyiapkan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan
bb. Menyiapkan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah kewenangan Kecamatan
cc. Menyiapkan kegiatan pengolahan data retribusi daerah kewenangan Kecamatan
dd. Menyiapkan kegiatan penetapan wajib retribusi daerah kewenangan Kecamatan
ee. Menyiapkan kegiatan pelaporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan
ii. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
jj. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
hh. Menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
ii. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
jj. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
kk. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
e. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian
f. Menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan
g. Menyiapkan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor
h. Menyiapkan kegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
i. Menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan fasilitasi kunjungan tamu di Kecamatan
j. Menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
k. Menyiapkan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
l. Menyiapkan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor
m. Menyiapkan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dan penyediaan bahan/material serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan
n. Menyiapkan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
o. Menyiapkan kegiatan pengadaan mebel, dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
p. Menyiapkan kegiatan pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tak berwujud, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
q. Menyiapkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
r. Menyiapkan kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya, pemeliharaan aset tak berwujud, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
s. Menyiapkan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Kecamatan

t. Menyiapkan kegiatan pengamanan barang milik daerah Kecamatan
u. Menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan
v. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan
w. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan Budaya Kerja Kecamatan
x. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan Zona Integritas
y. Menyiapkan kegiatan pengembangan inovasi Kecamatan
z. Menyiapkan kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan
å. Menyiapkan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Kecamatan
ä. Menyiapkan kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Kecamatan
ö. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian Kecamatan
aa. Menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Kecamatan
bb. Menyiapkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan bagi pegawai Kecamatan
cc. Menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan
dd. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian
ee. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian
ff. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
jj. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
kk. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
ii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai; d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi
d. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan
e. Menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik
f. Menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan
g. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah
h. Menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya

i. Menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis
j. Menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan
k. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya
l. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya
m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
o. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya
p. Menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
q. Menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat
r. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku
s. Menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan
t. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota
u. Menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
v. Menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
w. Menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
x. Menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
y. Menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
z. Menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
å. Menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
ä. Menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
ö. Menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
aa. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait

bb. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan
cc. Menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota
dd. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
hh. Menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan
ff. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan
gg. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan
hh. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan
ii. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
jj. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan
kk. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan
ll. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pembangunan
Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
e. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan
f. Menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
g. Menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat
h. Menyiapkan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan
i. Menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan
j. Menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
k. Menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
l. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik
m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat
n. Menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat
o. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk
p. Menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

q. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
r. Menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
s. Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal)
t. Menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah
u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan
v. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan
w. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan
x. Menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan
y. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
z. Menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait aa. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah
å. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan
ä. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan
ö. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
aa. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan
bb. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan
cc. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
e. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
f. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
g. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
h. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin

i. Menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial
k. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
l. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna
m. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan
n. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya
o. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
p. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana
q. Menyiapkan kegiatan fasilitasi administrasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia
r. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar
s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya
t. Menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial
u. Menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
v. Menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
w. Menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat
x. Menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga
y. Menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
z. Menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
å. Menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
ä. Menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
ö. Menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
aa. Menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
bb. Menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam
cc. Menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga

dd. Menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas
ee. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian
ff. Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan
gg. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
hh. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna
ii. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
jj. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
kk. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
ll. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
mm. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
nn. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
oo. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pelayanan Publik
Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
e. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik
f. Menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan
g. Menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi
h. Menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan
i. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik
j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik
k. Menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan
l. Menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
m. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait

n. Menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
o. Menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota
p. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
q. Menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
r. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
s. Menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah
t. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika
u. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik
v. Menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan
w. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik
x. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
y. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik
z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik
å. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
c. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
e. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
f. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
g. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat
h. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting
i. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota
k. Menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum

l. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat
m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat
o. Menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketentraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu
p. Menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
q. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan
r. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas
t. Menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum
u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul
v. Menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
w. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
x. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
y. Menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah
z. Menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
å. Menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
ä. Menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota
ö. Menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan; dd. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
aa. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan
bb. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
cc. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan

dd. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan
ee. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
ff. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
gg. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
hh. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
ii. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
jj. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
kk. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. LURAH

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Lurah memiliki tugas sebagai berikut :
b. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
c. Pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan
d. Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
f. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
g. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
i. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
j. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
k. Pelaksanaan kegiatan koordinasi;
l. Pelaksanaan kegiatan sekretariat;
m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
n. Pelaksanaan kegiatan pembangunan;
o. Pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
p. Pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
q. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
r. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
s. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
t. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
u. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
v. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ngaliyan

Sumber daya Kecamatan Ngaliyan terdiri dari aspek sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang tersedia. Dari sisi SDM, komposisi aparatur dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan. Data ini mencerminkan kualitas serta kapasitas aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Sedangkan dari sisi sarana dan prasarana, Kecamatan Ngaliyan saat ini didukung oleh aset berupa tanah dan gedung kantor. Ketersediaan sarpras ini menjadi faktor penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, khususnya terkait kelayakan fasilitas fisik yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional. Dengan demikian, pemetaan terhadap SDM dan sarpras ini memberikan gambaran awal mengenai kapasitas internal Kecamatan Ngaliyan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif.

a. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Ngaliyan merupakan unsur utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Komposisi aparatur dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan. Berdasarkan pendidikan, mayoritas pegawai telah menempuh jenjang menengah hingga tinggi, sehingga secara umum memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugas administratif maupun teknis. Namun demikian, perbedaan latar belakang pendidikan masih menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kompetensi dan keseragaman kualitas pelayanan.

Dari sisi golongan, struktur kepangkatan pegawai menunjukkan variasi yang mencerminkan jenjang karir aparatur di kecamatan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya keseimbangan antara pegawai yang sudah senior dengan pengalaman kerja panjang dan pegawai dengan golongan lebih rendah yang berpotensi untuk dikembangkan. Analisis terhadap dua aspek tersebut penting untuk menilai sejauh mana SDM Kecamatan Ngaliyan siap menghadapi tantangan pelayanan, sekaligus menjadi dasar bagi perencanaan peningkatan kapasitas aparatur di masa mendatang.

Sumber Daya manusia pada Kecamatan Ngaliyan diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ngaliyan Tahun 2024

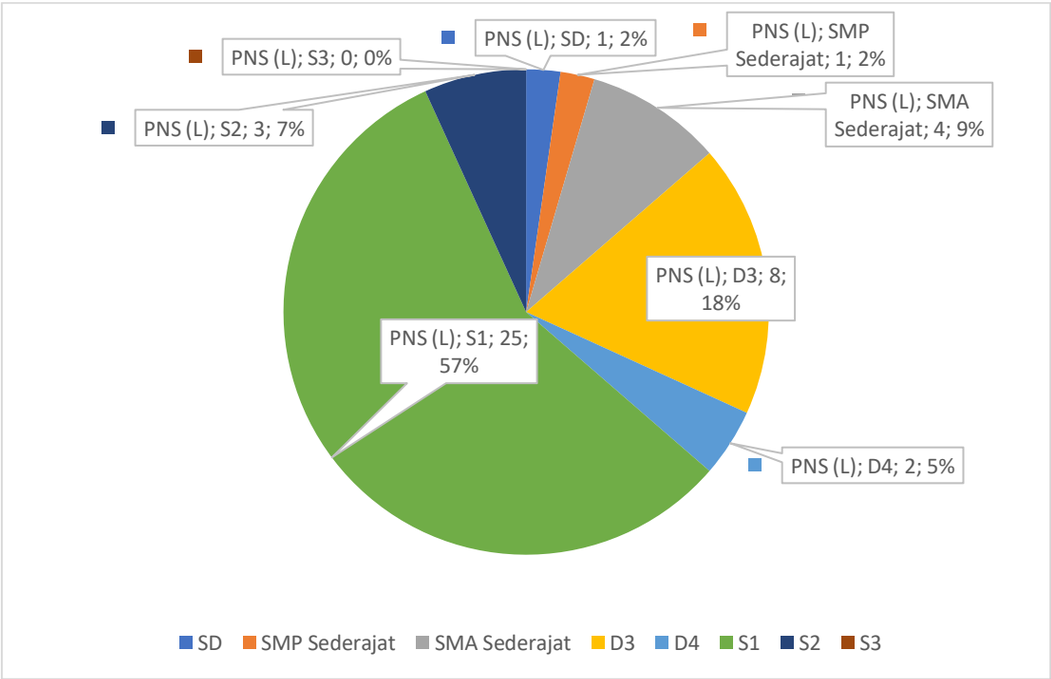

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, per Desember 2024

Berdasarkan Grafik di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas pegawai Kecamatan Ngaliyan Tahun 2024 didominasi oleh lulusan S1, yaitu sebanyak 61 orang atau 47% dari total keseluruhan pegawai. Jumlah ini menunjukkan bahwa hampir setengah aparatur telah memiliki kualifikasi pendidikan strata satu, yang menjadi modal penting dalam mendukung profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, pegawai dengan latar belakang SMA sederajat menempati posisi kedua dengan jumlah 30 orang atau sekitar 23%, disusul oleh lulusan D3 sebanyak 22 orang atau 17%. Kedua kelompok ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan teknis dan administratif sehari-hari di kecamatan. Sementara itu, lulusan S2 tercatat sebanyak 4 orang atau 3%, yang dapat menjadi potensi dalam penguatan analisis dan perumusan kebijakan meskipun jumlahnya masih terbatas.

Adapun pegawai dengan pendidikan D4 hanya 2 orang (2%), serta lulusan SMP sederajat dan SD masing-masing 2 dan 3 orang dengan persentase relatif kecil, yaitu sekitar 2%. Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S3.

Secara keseluruhan, komposisi ini memperlihatkan bahwa struktur pendidikan pegawai Kecamatan Ngaliyan masih terpusat pada jenjang S1, dengan dukungan signifikan dari lulusan menengah dan diploma. Untuk ke depan, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan lanjutan maupun pelatihan teknis menjadi hal yang strategis agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

Dari total pegawai Kecamatan Ngaliyan sebanyak 131 orang, selanjutnya dilakukan pemetaan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Pembagian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai struktur kepegawaian, khususnya dalam melihat sebaran pegawai dari golongan I hingga golongan IV. Melalui klasifikasi ini dapat diketahui

proporsi pegawai dengan golongan yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi, sehingga terlihat potensi sumber daya manusia yang dimiliki serta kebutuhan pengembangan karir aparatur ke depan. Rincian lengkap mengenai komposisi pegawai menurut golongan ditampilkan pada grafik berikut:

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Ngaliyan Tahun 2024

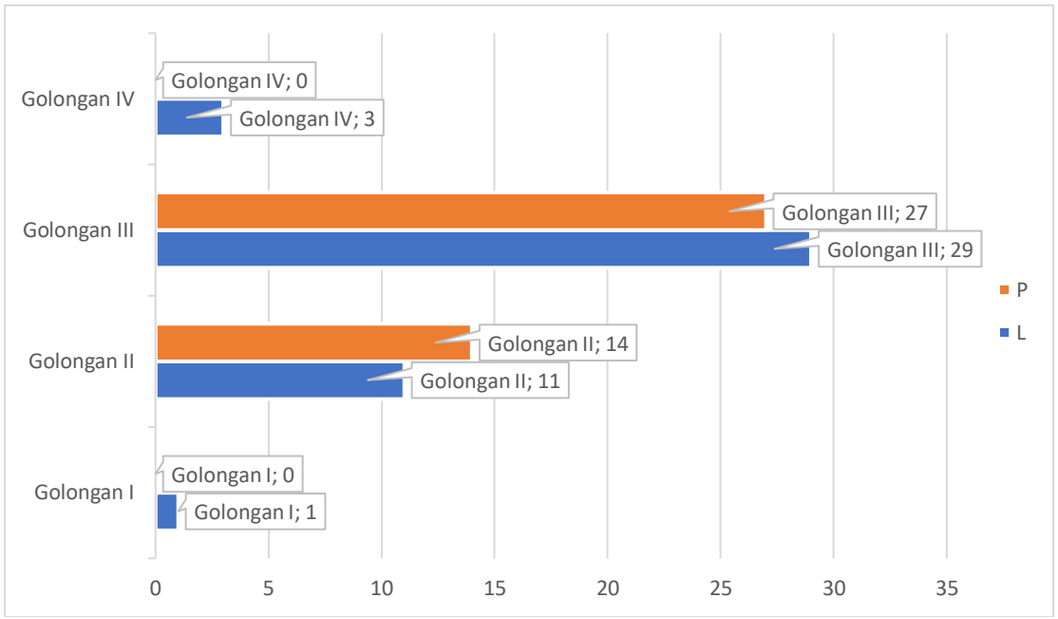

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, per Desember 2024

Berdasarkan Grafik 2, komposisi pegawai Kecamatan Ngaliyan Tahun 2024 sebagian besar berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 56 orang (29 laki-laki dan 27 perempuan). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang menengah, yang umumnya menduduki jabatan pelaksana hingga staf madya, sehingga menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pelayanan kecamatan.

Pegawai pada Golongan II menempati posisi berikutnya dengan jumlah 25 orang (11 laki-laki dan 14 perempuan). Kelompok ini berperan penting sebagai tenaga pelaksana dalam mendukung kegiatan administratif dan teknis. Sementara itu, jumlah pegawai pada Golongan IV relatif sedikit, yaitu hanya 3 orang, yang mencerminkan masih terbatasnya pegawai dengan jenjang karir tinggi di kecamatan. Adapun pegawai pada Golongan I hanya tercatat 1 orang, sehingga kontribusinya tidak signifikan dalam struktur keseluruhan.

Secara umum, distribusi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian Kecamatan Ngaliyan lebih terkonsentrasi pada Golongan II dan III, dengan dominasi Golongan III sebagai mayoritas. Komposisi tersebut menegaskan perlunya strategi pengembangan karier untuk mendorong peningkatan jumlah pegawai di Golongan IV, sehingga dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan dan manajerial di lingkungan kecamatan.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan. Ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi faktor pendukung

tercapainya pelayanan publik yang optimal. Selain berfungsi sebagai ruang kerja aparatur, sarana dan prasarana juga menjadi simbol kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga kondisi dan pemanfaatannya perlu dijaga serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam konteks kecamatan, sarana prasarana meliputi aset fisik berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor pelayanan, ruang pertemuan, serta fasilitas penunjang administrasi pemerintahan. Kualitas dan kecukupan aset ini akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pelayanan publik. Adapun rincian aset tanah dan bangunan yang dimiliki Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Aset Tanah Kecamatan Ngaliyan

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1332	1953	RW I	Hak Pakai	4/18/2007	HP 1	Kantor Kelurahan	Pembelian	689500	- Lain-Lain - 50.15.09.00
2.	Tanah Kebun Induk	3225	1954	RW II	Hak Pakai	26/07/2007	HP 4	Lapangan	Pembelian	1524150	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
3.	Tanah Kebun Induk	2220	1954	RW II	Hak Pakai	26/07/2007	HP 5	Pertanian	Pembelian	46980	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
4.	Tanah Lapangan Sepak Bola	3380	1954	RW II	Hak Pakai	26/07/2007	HP 9	Lapangan Sepak Bola	Pembelian	337500	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
5.	Tanah Bangunan Gedung Pameran	676	1979	Jl. Prof. Hamka No. 236 Ngaliyan	Hak Pakai	07/04/2007	35	KUA Ngaliyan	Pembelian	23660	-
6.	Tanah Bangunan Gedung Pameran	810	1979	Jl. Jend Urip Sumoharjo No.2	Hak Pakai	17/11/2005	4	Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan Wonosari	Pembelian	83430	-
7.	Tanah Pertanian lainnya	4100	1979	Jl. Karang Joho	Hak Pakai	17/11/2005	6	pertanian (Garapan)	Pembelian	2642,5	-
8.	Tanah Pertanian lainnya	1057	1979	Jl. Banjaran	Hak Pakai	17/11/2005	14	pertanian (JSDF)	Pembelian	1215	-
9.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	735	1980	Jl. Sri Widodo Utara 104	Hak Pakai	30/04/2007	HP 8	Kantor Kelurahan Purwoyoso	Pembelian	15000	- Lain-Lain - 50.15.04.00
10.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	3770	1980	RW II	Hak Pakai	26/07/2007	HP 10	Tanah Pertanian	Pembelian	95400	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
11.	Tanah Usaha	7010	1980	RW III	Hak Pakai	26/07/2007	HP 11	Tanah Pertanian	Pembelian	32400	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
12.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	405	1990	Podorejo Rt.01 RW.05	Hak Pakai	4/30/2007	HP 20	Lapangan Bola Volly	Pembelian	8100	- Ex-Bengkok - 50.15.02.00
13.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	450	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai	4/30/2007	HP 5	Balai Kelurahan Podorejo	Pembelian	9000	- Ex-Bengkok - 50.15.02.00
14.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600	1990	JL. Jend Urip Sumoharjo	Hak Pakai			Kantor Kelurahan	Pembelian	204000	- Hibah/Sumba

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
											ngan - 50.15.08.00
15.	Tanah Sawah Irigasi	1350	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Pertanian	Pembelian	40000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
16.	Tanah Sawah Irigasi	3755	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai	4/30/2007	HP 4	Pertanian	Pembelian	75100	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
17.	Tanah Sawah Irigasi	9850	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Pertanian	Pembelian	197000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
18.	Tanah Sawah Irigasi	3500	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai			Pertanian	Pembelian	146000	Blm sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
19.	Tanah Sawah Irigasi	3400	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Pertanian	Pembelian	68000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
20.	Tanah Sawah Irigasi	5600	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Lapangan	Pembelian	112000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
21.	Tanah Sawah Irigasi	14817	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai	4/30/2007	HP 13	Pertanian	Pembelian	296340	JSDF - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
22.	Tanah Sawah Irigasi	4622	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Pertanian	Pembelian	146000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
23.	Tanah Sawah Irigasi	2839	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai	4/30/2007	HP HP.007	Pertanian	Pembelian	56780	- Ex-Bengkok - 50.15.02.00
24.	Tanah Sawah Irigasi	1050	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Pertanian	Pembelian	27000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
25.	Tanah Sawah Irigasi	10871	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai	4/30/2007	HP HP.010	Pertanian	Pembelian	217420	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
26.	Tanah Kebun Induk	5535	1990	Kelurahan Podorejo	Hak Pakai	4/30/2007	HP HP. 029	Pertanian	Pembelian	110700	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
27.	Tanah Usaha	3778	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 23	Pertanian	Pembelian	75560	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
28.	Tanah Usaha	3096	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 2	Pertanian	Pembelian	61920	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
29.	Tanah Usaha	8508	1990	Podorejo RW.IX Palir	Hak Pakai	4/30/2007	HP 14	Pertanian	Pembelian	170160	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
30.	Tanah Usaha	9919	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 8	Pertanian	Pembelian	198380	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
31.	Tanah Usaha	7515	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 12	Pertanian	Pembelian	150300	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
32.	Tanah Usaha	10152	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 11	Pertanian	Pembelian	203040	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
33.	Tanah Usaha	4318	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 26	Pertanian	Pembelian	86360	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
34.	Tanah Usaha	4747	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 6	Pertanian	Pembelian	94940	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
35.	Tanah Usaha	6194	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 24	Pertanian	Pembelian	123880	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
36.	Tanah Usaha	3258	1990	Podorejo RW.IX	Hak Pakai	4/30/2007	HP 18	Pertanian	Pembelian	65160	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
37.	Tanah Usaha	3659	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 19	Pertanian	Pembelian	73180	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
38.	Tanah Usaha	8915	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 3	Pertanian	Pembelian	178300	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
39.	Tanah Usaha	2121	1990	Podorejo RW. X	Hak Pakai	4/30/2007	HP 21	Pertanian	Pembelian	42420	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
40.	Tanah Usaha	9955	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 22	Pertanian	Pembelian	199100	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
41.	Tanah Usaha	2024	1990	Podorejo RW.V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 25	Pertanian	Pembelian	40480	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
42.	Tanah Usaha	902	1990	Podorejo Rt.02 RW.02	Hak Pakai	4/30/2007	HP 27	Tanah Kosong	Pembelian	18040	- Ex-Bengkok - 50.15.02.00
43.	Tanah Usaha	594	1990	Podorejo RT.02	Hak Pakai	4/30/2007	HP 28	Balai RW. 02	Pembelian	11880	- Ex-Bengkok - 50.15.02.00
44.	Tanah Usaha	3014	1990	Podorejo RW. V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 30	Pertanian	Pembelian	60280	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
45.	Tanah Usaha	2336	1990	Podorejo RW.03	Hak Pakai	4/30/2007	HP 31	Pertanian	Pembelian	46720	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
46.	Tanah Usaha	669	1990	Podorejo RT.02	Hak Pakai	4/30/2007	HP 31	Puskesmas	Pembelian	13380	- Ex-Bengkok - 50.15.02.00
47.	Tanah Usaha	3200	1990	Podorejo	Hak Pakai		Proses Sertifika		Pembelian	64000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
48.	Tanah Usaha	3000	1990	Podorejo	Hak Pakai		Proses Sertifikat		Pembelian	60000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
49.	Tanah Usaha	6194	1990	Podorejo RW.IX	Hak Pakai	4/30/2007	P 28/17	Pertanian	Pembelian	123880	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
50.	Tanah Usaha	9524	1990	Podorejo RW. V	Hak Pakai	4/30/2007	HP 16	Pertanian	Pembelian	190480	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
51.	Tanah Usaha	8350	1990	Podorejo RW.X Timur	Hak Pakai		Proses Sertifikat		Pembelian	167000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
52.	Tanah Usaha	7950	1990	Podorejo RW.X	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Kantor Kelurahan	Pembelian	159000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
53.	Tanah Usaha	1500	1990	Podorejo RT.03 RW.X	Hak Pakai			Rumah Dinas Lurah	Pembelian	30000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
54.	Tanah Usaha	7784	1990	Podorejo RW.Ix	Hak Pakai	4/30/2007	HP 15	Pertanian	Pembelian	155680	Sawah - Ex-Bengkok - 50.15.02.00
55.	Tanah Lapangan Sepak Bola	11897	1990	Kelurhan Podorejo	Hak Pakai	12/28/2007	HP 35	lapangan Sepak Bola	Pembelian	514896	- Ex-Bengkok - 50.15.02.00
56.	Tanah Bangunan Industri lainnya (dst)	250	1992	Jl. Jendral urip	Hak Pakai	12/30/1992			Pembelian	85000	Bekas Bangunan SD/ Rusak - Ex-Bengkok - 50.15.08.00
57.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	320	1993	Jl. KRT Wongsonego	Hak Pakai	7/4/2007	HP 3	Kantor Kelurahan	Pembelian	48000	- Ex-Bengkok - 50.15.01.01
58.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1985	1993	Jl Beringin Raya No. 1	Hak Pakai	6/4/2007	HP 3	Rumah Dinas Lurah Beringin	Pembelian	99250	- Ex-Bengkok - 50.15.03.00
59.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	755	1993	Jl. Prof DR Hamka RT	Hak Pakai	4/30/2007	HP 23	Kantor Kelurahan Ngaliyan	Pembelian	453000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
60.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1450	1993	Jl Abdulrahma	Hak Pakai	4/18/2007	HP 1	Kantor Kelurahan Kalipancur	Pembelian	803250	- Ex-Bengkok - 50.15.10.00
61.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	3461	1993	Jl KRT Wongsonego	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Panti Jompo	Pembelian	519150	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.01.01
62.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2895	1993	Jl. KRT Wongsonego	Hak Pakai	7/4/2007	HP 7	Pertanian	Pembelian	434250	JSDF - Ex-Bengkok - 50.15.01.01
63.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	660	1993	Jl. KRT Wongsonego	Hak Pakai	7/4/2007		Rumah Dinas Lurah	Pembelian	99000	- Ex-Bengkok - 50.15.01.01

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
64.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	544	1993	Jl. Panembahan	Hak Pakai	4/30/2007	HP 22	KUD	Pembelian	272000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00 Properti Investasi
65.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	490	1993	Jl Prof DR Hamka RT 02 RW I	Hak Pakai	4/30/2007	HP 28	Gedung PKK dan LPMK	Pembelian	294000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
66.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	599	1993	Jl. KRT Wongsonegoro RT 01	Hak Pakai	7/4/2007	HP 5	Balai Kelurahan	Pembelian	89850	- Ex-Bengkok - 50.15.01.01
67.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	3514	1993	Jl. KRT Wongsonegoro RT 01 RW VII	Hak Pakai	7/4/2007	HP 1	Pertanian	Pembelian	527100	JSDF - Ex-Bengkok - 50.15.01.01
68.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1067	1993	Jl. Wismasari Utara RT 02	Hak Pakai	7/4/2007	HP 33	Kantor PKBM	Pembelian	533500	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
69.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	5191	1993	Jl. Raya Walisongo KM 8	Hak Pakai	1/29/1998	HP 6	Balai Desa	Pembelian	2595500	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00
70.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1500	1993	RT 01 RW VII	Hak Pakai	4/30/2007	HP 11	Pertanian	Pembelian	75000	- Ex-Bengkok - 50.15.03.00 Properti Investasi
71.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	3725	1993	RW IX	Hak Pakai	6/4/2007	HP 8	Pertanian	Pembelian	186250	JSDF - Ex-Bengkok - 50.15.03.00
72.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	412	1993	Tanjungsari RT 01 RW 05	Hak Pakai	3/30/1998	HP 32	TK PGRI 07	Pembelian	123600	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00
73.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2267	1993	RW IX	Hak Pakai	4/30/2007	HP 9	Pertanian	Pembelian	113350	JSDF - Ex-Bengkok - 50.15.03.00 Properti Investasi
74.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	7457	1993	RW IX	Hak Pakai	4/30/2007	HP 10	Pertanian	Pembelian	372850	JSDF - Ex-Bengkok - 50.15.03.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
75.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	5500	1993	RW VII	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Pertanian JSDF	Pembelian	275000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.03.00 Properti Investasi
76.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	7457	1993	RT 10 RW 7	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Pertanian JSDF	Pembelian	372850	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.03.00 Properti Investasi
77.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	3910	1993	RW VIII	Hak Pakai	12/28/2007	HP 13	Lapangan Sepak Bola	Pembelian	195500	JSDF - Ex-Bengkok - 50.15.03.00 Properti Investasi
78.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	1595	1993	RT 01 RW VII Kel. Beringin	Hak Pakai	2/28/2007	HP 19	Pertanian	Pembelian	79750	JSDF - Ex-Bengkok - 50.15.03.00
79.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	7445	1993	RT 01 RW VII	Hak Pakai	6/4/2007	HP 7	Pertanian	Pembelian	372250	JSDF - Ex-Bengkok - 50.15.03.00 Properti Investasi
80.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	613	1993	RT 05 RW I	Hak Pakai		HGB	Tower Air	Pembelian	30650	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.03.00
81.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	601	1993	RT 06 RW I	Hak Pakai		HGB 315	Lapangan Volly	Pembelian	30050	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.03.00
82.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	336	1993	RT 09 RW	Hak Pakai		HGB 309	Masjid	Pembelian	16800	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.03.00
83.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	857	1993	RT 09 RW I	Hak Pakai		HGB 14	Lapangan	Pembelian	42850	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.03.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
84.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	1270	1993	Jl. Prof DR Hamka RT 02 RW I	Hak Pakai	4/30/2007	HP 25	Rumah Dinas Lurah Ngaliyan	Pembelian	76200	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
85.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	480	1993	Jl Prof DR Hamka RT 02 RW I	Hak Pakai	4/30/2007	HP 24	Balai Kelurahan Ngaliyan	Pembelian	288000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
86.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	483	1993	Jl Prof DR Hamka RT 02 RW I Kelurahan Ngaliyan	Hak Pakai	4/30/2007	HP 26	PKL Puja Sera	Pembelian	289800	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
87.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	2583	1993	Jl. Prof DR Hamka RT 02 RW I	Hak Pakai	12/5/2007	HP 38	Sanggar Pramuka	Pembelian	1000000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
88.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	8633	1993	Jl Prof DR Hamka RT 02 RW I	Hak Pakai	4/30/2007	HP 18	pertanian / PKL	Pembelian	5179800	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00 Properti Investasi
89.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	2200	1993	Jl. Baru RT 6 RW 1	Hak Pakai Hak Pakai	8/24/2007	HP 36	Penghijauan	Pembelian	1100000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
90.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	4265	1993	Jl. Desel RT 01 RW IX	Hak Pakai	4/30/2007	HP 17	Tanah Kosong	Pembelian	319875	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00 Properti Investasi
91.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	2195	1993	Jl. Wismasari Raya RT 02 RW I	Hak Pakai	12/5/2007		Terminal Ngaliyan/Tempat Parkiran Pasar	Pembelian	750000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00 Properti Investasi
92.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	1597	1993	Jl. Wismasari Utara RT 02 RW I	Hak Pakai	4/30/2007		Tanah Kosong	Pembelian	798500	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00 Properti Investasi
93.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	3290	1993	Beringin RT 05 RW IX	Hak Pakai	8/6/2007	HP 32	Pertanian	Pembelian	214400	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
94.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	8410	1993	Beringin RT 05 RW IX	Hak Pakai	8/6/2007	HP 31	Pertanian	Pembelian	582400	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00
95.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	60	1993	Jl. Margoyoso RT 07 RW IV	Hak Pakai	1/29/1998	HP 8	Balai RT 07 RW IV	Pembelian	15000	Posyandu - Ex-Bengkok - 50.15.07.00
96.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	1116	1993	Jl. Raya Walisongo	Hak Pakai	11/17/2005	HP 22	Rumah Dinas Lurah Tambakaji	Pembelian	558000	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00
97.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst	243	1993	Jl. Candi Prambanan Utara RT 07 RW 11	Hak Pakai	4/30/2007	HP 5	Rumah Dinas Lurah Kalipancur	Pembelian	292091	- Ex-Bengkok - 50.15.10.00
98.	Tanah Tegalan	600	1993	Kena Tol	Hak Pakai			Tanah Tegalan	Pembelian	90000	Belum Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.01.01(Penelusuran 2023)
99.	Tanah Tegalan	152	1993	Jl. KRT Wongsonegoro RT 01 RW VII	Hak Pakai	7/26/2007	HP 10	Tegalan	Pembelian	22800	Tanah Kosong - Ex-Bengkok - 50.15.01.01(Penelusuran 2023)
100.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4240	1993	RW III	Hak Pakai	12/14/2007	HP 19	Tanah Pertanian	Pembelian	147150	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
101.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4700	1993	RW III	Hak Pakai	7/26/2007	HP 7	Tanah Pertanian	Pembelian	95850	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
102.	Tanah Kering Lainnya	2210	1993	Beringin RT 01 RW IX	Hak Pakai			Among Jiwo	Pembelian	108800	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.07.00(Penelusuran 2023)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
103.	Tanah Lapangan Sepak Bola	13980	1993	Jl. Wismasari Utara RT 02 RW I	Hak Pakai	12/5/2007	HP 43	Lapangan Sepak Bola	Pembelian	6000000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
104.	Tanah Lapangan Lainnya	2110	1993	Jludang RW II	Hak Pakai	12/28/2007	HP 11	Lapangan	Pembelian	158250	- Ex-Bengkok - 50.15.01.01
105.	Tanah Lapangan Lainnya	1642	1993	Kalikangkung RT 02 RW I	Hak Pakai	7/26/2997	HP 9	Lapangan	Pembelian	164200	- Ex-Bengkok - 50.15.01.01
106.	Tanah Lapangan Lainnya	1727	1993	Jl Prof DR Hamka RT 02 RW I	Hak Pakai	4/30/2007	HP 29	Lapangan Basket	Pembelian	1036000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
107.	Tanah Lapangan Lainnya	1585	1993	Beringin RT 01 RW IX	Hak Pakai	8/6/2007	HP 29	Lapangan Olah Raga	Pembelian	25600	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00(Penelusuran 2023)
108.	tanah kampung lainnya (dst)	7540	1993	KP. Gondoriyo RT 04 RW IV	Hak Pakai	7/4/2007	HP 8	Pertanian	Pembelian	377000	- Ex-Bengkok - 50.15.01.01
109.	tanah kampung lainnya (dst)	4240	1993	Kp. Gondoriyo RT 04 RW I	Hak Pakai	4/7/2007	HP	Pertanian	Pembelian	205000	- Ex-Bengkok - 50.15.01.01(Penelusuran 2023)
110.	tanah kampung lainnya (dst)	2345	1993	Jl Beringin Raya No. 1 RT 01 RW I	Hak Pakai	12/28/2007	HP 12	Kantor Kelurahan Bringin	Pembelian	117250	- Ex-Bengkok - 50.15.03.00
111.	tanah kampung lainnya (dst)	400	1993	Jl. Lingkar RT 02 RW I	Hak Pakai		Proses Sertifikat	PKL Taman Bunga	Pembelian	240000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.06.00
112.	tanah kampung lainnya (dst)	1170	1993	Jl. Panembahan Senopati RT 02 RW I	Hak Pakai	4/30/2007	HP 27	PKL Panembahan Senopati	Pembelian	702000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
113.	tanah kampung lainnya (dst)	735	1993	Jl. Panembahan Senopati RT 02 RW I	Hak Pakai	4/30/2007	HP 21	Taman Panembahan Senopat	Pembelian	441000	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
114.	tanah kampung lainnya (dst)	702	1993	Jl. Panembahan Senopati RT 02 RW I	Hak Pakai	4/30/2007	HP 20	PKL Suka Rasa	Pembelian	421200	- Ex-Bengkok - 50.15.06.00
115.	tanah kampung lainnya (dst)	2315	1993	Beringin RT 01 RW IX	Hak Pakai			Tegalan	Pembelian	544000	Blm Sertifikat - Ex-Bengkok - 50.15.07.00(P

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor				
											enelusuran 2023)
116.	emplasment lainnya (dst)	1554	1993	Jl. Bukit Barisan RW VIII	Hak Pakai Hak Pakai	6/4/2007	HP 5	Makam	Pembelian	77700	- Ex-Bengkok - 50.15.03.00
117.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1620	1994	Prof DR Hamka Ngaliyan Semarang	Hak Pakai	7/4/2007	HP 34	Kantor Kecamatan Ngaliyan	Pembelian	900000	- Ex-Bengkok - 50.15.01.00
118.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	690	1995	Jl. Untung Suropati	Hak Pakai	4/18/2007	HP 5	Kantor Kelurahan Bambankerep	Pembelian	120000	- Hibah/Sumbangan - 50.15.05.00
119.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1605	1997	Perum BPI	Hak Pakai	6/4/2007	HP 9	Penghijauan/Hutan Kota	Pembelian	10000	Hutan Kota - Ex-Bengkok - 50.15.04.00
120.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	214	1998	RT 03 RW 01 Kelurahan Kalipancur	Hak Pakai	3/17/1998	HP 1	Balai RW 1 Kelurahan Kalipancur	Pembelian	876273	Masuk HP. 1 - Ex-Bengkok - 50.15.10.00
121.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	863	1998	Tambakaji RT03 RW,VIII	Hak Pakai	2/27/1998	HP 9	Makam	Pembelian	74000	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00(Penelusuran 2023)
122.	Tanah Kaveling (dst)	282	2007	Tambakaji RT 03 RW. IX	Hak Pakai	2/27/1998		Balai RW	Pembelian	71000	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00(Penelusuran 2023)
123.	Tanah Kaveling (dst)	1004	2007	Jl. Prof Dr. Hamka No.234	Hak Pakai	7/4/2007	HP 30	Rumah Dinas Camat	Pembelian	959000	- Ex-Bengkok - 50.15.01.00
124.	Tanah Sawah Irigasi	1080	2007	Wates	Hak Pakai	7/26/2007	HP 8	Pertanian	Pembelian	52000	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
125.	Tanah Sawah Irigasi	4390	2007	Kelurahan wates RW.III	Hak Pakai	12/14/2007	HP 18	Pertanian	Pembelian	243000	- 50.15.09.00

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
126.	Tanah Sawah Irigasi	1520	2007	Kelurahan wates Rw. III	Hak Pakai	7/26/2007	HP 6	Pertanian	Pembelian	73000	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
127.	Tanah Sawah Irigasi	8800	2007	Kelurahan wates Rw.II	Hak Pakai	12/14/2007	HP 21	Pertanian	Pembelian	412000	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
128.	Tanah Sawah Irigasi	4240	2007	Jl. Perumahan Palir Rt.04 Rw.III kel wates	Hak Pakai	7/26/2007	HP 13	Pertanian	Pembelian	205000	- Lain-Lain - 50.15.09.00
129.	Tanah Sawah Irigasi	6850	2007	Kelurahan Wates RT.02 RW.III	Hak Pakai	12/14/2007		Pertanian	Pembelian	332000	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
130.	Tanah Sawah Irigasi	3050	2007	Kelurahan Wates III	Hak Pakai	12/14/2007	HP 16	Pertanian	Pembelian	153000	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
131.	Tanah Sawah Irigasi	7740	2007	Kelurahan Wates .II	Hak Pakai	12/14/2007	HP 20	Pertanian	Pembelian	374000	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
132.	Tanah Sawah Irigasi	7910	2007	Kelurahan Wates RW.3	Hak Pakai	7/26/2007	HP 14	Pertanian	Pembelian	400000	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
133.	Tanah Sawah Irigasi	16250	2007	Kelurahan wates RW.003	Hak Pakai	7/26/2007	HP 12	Pertanian	Pembelian	685000	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
134.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4210	2007	Tambakaji RT.01 RW.IX	Hak Pakai	8/6/2007	HP 27	Mangkrak/ terbengkalai	Pembelian	676000	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00(Penelusuran 2023)
135.	Tanah Kebun Induk	12430	2007	Kelurahan Wates	Hak Pakai	12/14/2007	HP 22	Pertanian	Pembelian	542000	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00
136.	Tanah Untuk Jalan Nasional	810	2007	Tambakaji RT.03 RW.IX	Hak Pakai	8/6/2007	HP 30	Jalan	Pembelian	162000	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00(Penelusuran 2023
137.	Tanah Untuk Jalan Nasional	610	2007	Tambakaji RT.5 RW.IX	Hak Pakai	6/8/2007	HP 30	Jalan	Pembelian	122000	- Ex-Bengkok - 50.15.07.00(Penelusuran 2023)
138.	tanah kampung lainnya (dst)	1050	2007	RW II	Hak Pakai	7/26/2007	HP 2	Balai Desa Lawas	Pembelian	32400	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00.

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
											Kegunaan Untuk Sawah
139.	tanah kampung lainnya (dst)	1925	2007	RW II	Hak Pakai	7/26/2007	HP 3	Kebun Buah	Pembelian	74250	- Ex-Bengkok - 50.15.09.00. Pengelola Dinas Pertanian
140.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5220	2014	Puri Bukit Ngaliyan	Hak Pakai	12/23/2014		Tanah Jaringan Jalan	Pembelian	835200	BAST Nomor 050/0325/2014 An. WH - Penilaian Fasum Fasos - 50.15.01.00(Penelusuran 2023)
141.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	224	2014	Puri Bukit Ngaliyan	Hak Pakai	12/23/2014		Tanah Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan	Pembelian	35840	BAST Nomor 050/0325/2014 An.WH - Penilaian Fasum Fasos - 50.15.01.00(Penelusuran 2023)
142.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	118	2014	Puri Bukit Ngaliyan	Hak Pakai	12/23/2014		Tanah Sarana Air Bersih	Pembelian	18880	BAST Nomor 050/0325/2014 An.WH - Penilaian Fasum Fasos - 50.15.01.00(Penelusuran 2023)
143.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	137	2014	Puri Bukit Ngaliyan	Hak Pakai	12/23/2014		Tanah Sarana Peribadatan	Pembelian	21920	BAST Nomor 050/0325/2014 An. WH - Penilaian Fasum Fasos - 50.15.01.00(P

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
											enelusuran 2023)
144.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	305	2014	Puri Bukit Ngaliyan	Hak Pakai	12/23/2014		Tanah Sarana Pertamanan dan RTH	Pembelian	48800	BAST Nomor 050/0325/2014 An.WH - Penilaian Fasum Fasos - 50.15.01.00(Penelusuran 2023)
145.	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	1192	2019	Jl. Urip Sumoharjo Km. 16 Wonosari Ngaliyan Kota Semarang	Hak Pakai			Masjid Mangkang	Pembelian	3872155	
146.	Tanah Lapangan Sepak Bola	424	2022	. SULER RT 05 RW II WATES	Hak Pakai	7/14/2022	1172	PRASARANA OLAHRAGA SULER	Pembelian	298350	LAPANGAN OLAHRAGA SULER
147.	Tanah Lapangan Sepak Bola	9796	2022	. SULER RT 05 RW II WATES	Hak Pakai	7/14/2022	1174	LAPANGAN SEPAKBOLA SULER	Pembelian	6877494	LAPANGAN OLAHRAGA SULER
148.	Tanah Lapangan Bola Volly	831	2022	JL. SULER RT 05 RW 02 KEL. WATES	Hak Pakai	7/14/2022	1173	LAPANGAN VOLY SULER	Pembelian	584064	LAPANGAN OLAHRAGA SULER
149.	Tanah Kampung	301	2022	JL. RAYA GONDORIYO-WATES RT 11 RW 02	Hak Pakai	7/14/2022	1175	AULA RW 02 WATES	Pembelian	242204	TANAH AULA RW 2 WATES
150.	Tanah Kampung	340	2022	Jl. Anyar RT 11 RW 02	Hak Pakai	7/14/2022	0	Tabah Kosong	Hibah	101840	Penemuan tanah aset Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

Tabel 2.2
Gedung dan Bangunan Kecamatan Ngaliyan

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	70	Jl. Urip Sumoharjo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	70000
2.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	90	Jl. Prof dr. Hamka Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	614771.475
3.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	70	Jl. Prof dr. Hamka Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	96899.013
4.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	173	Jl. Prof dr. Hamka Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	553755.464
5.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	90	Jl. Prof DR Hamka		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	90000
6.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	300	Jl. Prof DR Hamka		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1911942.625
7.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	116	Jl. Sri Widodo Utara 104		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	643475.348
8.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. Sri Widodo Utara 104		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	433248.129
9.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	145	Jl. Raya Walisongo KM 8		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	512460.874
10.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	450	Jl. Kauman Podorejo RT 03 RW.10		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	459985.554
11.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	216	Jl. Kauman Podorejo RT 03 RW .10		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	487422.6
12.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	173	Jl Urip Sumoharjo No.2		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	50.15.08.00 (Balai Kelurahan)
13.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	238	Jl. Raya Walisongo KM 8		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	680422.862
14.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	300	Jl. KRT Wongsonegoro RT 01 RW VII Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	409525.403

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
15.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl Raya Walisongo RT 04 RW IV		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	82750.987
16.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	90	Jl. Urip Sumoharjo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	90000
17.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. KRT Wongsonegoro RT 01 RW VII		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	727121.415
18.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Beringin Raya No. 1 RT 01 RW I		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	479038
19.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	150	Jl. Anyar Duwet Wates,Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	180360
20.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	250	Jl. Moch Ihsan No.114		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	324696.741
21.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	165	Jl. Abdulrahman Saleh 291		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	504682.103
22.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	180	Jl. Abdulrahman Saleh 291		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	699213.481
23.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	60	Jl. Candi Prambanan Utara RT 07 RW 11		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	72000
24.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	531	Jl. Prof DR Hamka		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1948464.729
25.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Untung Suropati		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	263761.271
26.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	Jl. KRT Wongsonegoro RT 01 RW VII		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	240000
27.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	27	Jl. Sri Widodo Utara 104		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	137298.619
28.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	405	Jl. Kauman Podorejo RT 03 RW.10		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	83800
29.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	45	Jl Beringin Raya No. 1 RT 01 RW I		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	98328.418

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
30.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	65	Jl. Sri Widodo Utara 104		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	99422
31.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	45	Jl. Untung Suropati		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	54000
32.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	90	Jl Untung Suropati		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	562997.5
33.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	64	Jl Tugu Lapangan RT 01 RW I		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	76800
34.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	100	Kelurahan Gondoriyo Kec. Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	96965
35.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	55	Jl. Prof DR. Hamaka		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	211403
36.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	85	Jl. Prof DR. Hamaka		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	16201
37.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	60	Jl. KRT. Wongsonegoro Rt.01 Rw. VII		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	4500
38.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	300	Jl. KRT. Wongsonegoro Rt.01 RW.VII		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	46235
39.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Kauman podorejo Rt.03 Rw.10		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	140395
40.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	300	Jl. Beringin Raya No.1 Rt.01 Rw.I		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	710463.77
41.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	120	Jl. Sri Wibowo Utara 104		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	204192

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
42.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	105	JL. Untung suropati		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	229575
43.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	100	l. Urip Sumoharjo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	728436.308
44.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	200	JL. Mr.Moch Ichsan No.114		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	21333
45.	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	6	Kantor Kecamatan Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	29071.7
46.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	49	Jl. Prof. Dr Hamka		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	137215
47.	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik		Jl.Prof Dr. Hamka no. 234 Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	20000
48.	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Baik	400	Bukit Beringin Elok II No.270		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	99669
49.	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	12	Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngalian		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	57950.35
50.	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	20	Kelurahan Bringin Kecamatan Ngalian		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	82035.722

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
51.	Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen	Baik	1000	RT 02 RW 01 Kel. Ngaliyan		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	149606
52.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	1600	Jl. Prof DR Hamka Kl. Ngaliyan		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	149625
53.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	100	RW.2 Kel. Wates		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	85667.03
54.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	150	RW.2 Kel. Wates		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	91634.882
55.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	60	RW.3Kel. Gondoriyo		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	72874.007
56.	Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	20	RW.2Kel. Kalipancur		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	54784.347
57.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Baik		RT 02 RW 06 Kel. Ngaliyan		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	120231.013
58.	Tugu Pembangunan	Baik	20	RW.2 Kel. Gondoriyo		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	24592.137
59.	Tugu Pembangunan	Baik	20	RW.2 Kel. Kalipancur		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	33165.622

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
60.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	80	RW.3 Kelurahan Bambankerep		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	179628.5
61.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	40	Dk. Grujugan RW. 7 Kelurahan Podorejo		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	179724.5
62.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	80	Rw. 5 Kelurahan Wonosari		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	179610.5
63.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	40	Kel. Wonosari RW.5		Tanah Hak Lainnya	PEMBELIAN	79472.5
64.	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	80	Jl. Prof Hamka No. 234 Ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	108316
65.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	190	Ngaliyan , Karonsih		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	57980
66.	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik		Jl. Segaran 2 RW 4 Tambakaji			PEMBELIAN	154226
67.	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	13.5	JL.WISMASARI UTARA SEBELAH POLSEK NGALIYAN		Tanah Milik Pemda	Hibah	117345.183
68.	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	9.15	JL.BUKIT BERINGIN SELATAN BLOK F RT 3 RW 5 KEL GONDORIYO		Tanah Milik Pemda	Hibah	209311.604

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
69.	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	6.2	JL.BUKIT BERINGIN SELATAN BLOK F RT 3 RW 5 KEL GONDORIYO		Tanah Milik Pemda	Hibah	124161.687
70.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik		jalan gunung jati timur RT 7 RW 2 kel wonosari			PEMBELIAN	164189
71.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	284	RT 7 RW 2 KEL WONOSARI		Tanah Milik Pemda	Hibah	376115.265
72.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	500	RT 2 RW 9 KALIPANCUR		Tanah Milik Pemda	Hibah	251110.48
73.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	924	JL.WISMASARI SELATAN SEBELAH POLSEK NGALIYAN		Tanah Milik Pemda	Hibah	717241.817
74.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	676	LAPANGAN TENIS RT 7 RW 11		Tanah Milik Pemda	Hibah	965070.98
75.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	553.8	Jl.Bukit Beringin Selatan RT 3 RW 5 Kel Gondoriyo		Tanah Milik Pemda	Hibah	1236672.22
76.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	740.22	jl. rowosari kel. wonosari kec.ngaliyan			PEMBELIAN	5297212.844
77.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Baik	29.65	jl. rowosari kel. wonosari kec. ngaliyan			PEMBELIAN	61931.078

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
78.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	36	Balai RW.02 lJl. RW. 02 Kelurahan Purwoyoso		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	69586
79.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	30	Balai RW.06, RW11 Kelurahan Purwoyoso		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	69570
80.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	24	Jl. Sri Widodo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	69298
81.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	36	Rumah Pintar RT.03 RW. 15 JL. RT.03 RW.15 Kel. Wonosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	71939
82.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	24	Balai RW, 07 Jl. Kuda RT.05 Rw.07 Kel. Wonosari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	103139
83.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	748.34	jl.rowosari kel.wonosari kec.ngaliyan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	450747.607
84.	Taman Permanen	Baik	81	jl. rowosari kel.wonosari kec.ngaliyan			PEMBELIAN	222258.478
85.	Pagar Permanen	Baik	51	jl. rowosari kel.wonosari kec.ngaliyan			PEMBELIAN	150038.916
86.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	271.9	Jl. Walisongo Raya KM.5		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	198351.68

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
87.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	564	JL. WALISONGO KM.5			PEMBELIAN	371635.083
88.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	1270.5	Jl. Suler RT 5 RW 2 Kel Wates		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	191130.362
89.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	425.5	JL. SULER RT 2 RW 5 KEL WATES		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	185857.396
90.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	72	Jl. Kauman No. 2 Podorejo		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	197128
91.	Bangunan Posyandu	Baik	31.32	JL CANDI TEMBAGA SELATAN I RT 10 RW 05 KEL KALIPANCUR		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	78204.37
92.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	58.9	RT 15 RW 02 KEL KALIPANCUR		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	53553.026
93.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	200	RW 1 KEL. GONDORIYO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	62584
94.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	0	RW 5 KEL. NGALIYAN		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	189105
95.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	600	Jl. Kalikangkung RT 2 RW 1		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	247073.856

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
96.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	350	tambakaji		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	138328.922
97.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Baik	104	Jl. Jend Urip Sumoharjo No. 1 Kota Semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	263508.586
98.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Baik	152	Jl. Wismasari		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	495814.108
99.	Taman Permanen	Baik	719.4	Jl. Prof Dr Hamka No. 234 Depan Kecamatan		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	183066.1
100.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	100	RT 1 RW 12 PURWOYOSO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	105453
101.	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	100	RW 2 PODOREJO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	139687
102.	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	100	RW 9 PODOREJO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	77867
103.	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	100	RT 3 RW 8 TAMBAKAJI		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	71927
104.	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	100	RT 3 RW 15 TAMBAKAJI		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	122077

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
105.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RW I BAMBANKEREP		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	111820
106.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	120	Jl. Urip Sumoharjo			PEMBELIAN	408054
107.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RW 10 GONDORIYO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	69289
108.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RT 12 RW 11 WONOSARI		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	79758
109.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RW 7 WONOSARI		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	79692
110.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RW 13 PURWOYOSO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	71056
111.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RT 11 RW 1 KALIPANCUR		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	65804
112.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	BALAI RW 8		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	94161
113.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RW 11 PURWOYOSO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	56177

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
114.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RT 3 RW 15 WONOSARI		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	85859
115.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RW 2 WONOSARI		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	149965.001
116.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RW 4 KALIPANCUR		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	94138
117.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RW 12 KALIPANCUR		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	70402
118.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	MAYANGSARI RT 5 RW 2 KALIPANCUR		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	70286
119.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	JL.CANDI PRAMBANAN 7 RW 10		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	84493
120.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	100	BAK TANDON PURWOYOSO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	79254
121.	Tugu/tanda batas lainnya	Baik	50	JL. BUKIT NGALIYAN PERMAI BLOK G RT 3 RW 7		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	54775
122.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	20	PEMBANGUNAN BALAI RW I JL. SRIWIDODO UTARA RT 01 RW 01 KEL. PURWOYOSO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	46029

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
123.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	100	RT 5 RW 12 BRINGIN		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	49772
124.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RT 2 RW 12 PURWOYOSO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	49848
125.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RT 8 RW 1 KALIPANCUR		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	49844
126.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RT 10 RW 2 KALIPANCUR		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	49673
127.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	100	RT 4 RW 12 PURWOYOSO		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	49838
128.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	60	JL. Prof dr Hamka No. 234		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	19994

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngaliyan

Pada bagian ini ditampilkan hasil capaian kinerja Kecamatan Ngaliyan selama periode Renstra 2021–2026. Capaian tersebut diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat, inovasi pelayanan publik, persentase pelayanan sesuai standar PATEN, tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan wawasan kebangsaan, serta nilai AKIP kecamatan. Data yang disajikan mencakup target tahunan, realisasi capaian, serta rasio ketercapaian, sehingga dapat memberikan gambaran sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Ngaliyan

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngaliyan berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan kewilayahan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Ngaliyan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=9/4 x 100%	15=10/5 x 100%	16=11/6 x 100%	17=12/7 x 100%	18=13/8 x 100%
1.	**Indikator Tujuan:**																
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,00	87,00	87,50	88,00	88,35	89,00	94,00	86,68	94,15	93,70	104,70%	108,05%	99,06%	106,99%	106,05%
2.	**Indikator Sasaran:**																
a.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	N/A	N/A	1,00	-	-	N/A	N/A	1,00	-	-	N/A	N/A	100,00%	-	-
b.	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	N/A	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	N/A	90,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	N/A	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
c.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00%	80,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
d.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	40,00%	45,00%	-	-	N/A	40,00 %	50,00%	-	-	N/A	100,00%	88,89%	-	-
e.	Persentase Penyelenggaraan	Persen	-	81,68%	83,36%	85,04%	86,72%	-	84,00 %	86,00%	86,00%	95,00%	-	102,84%	103,17%	101,13%	109,55%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Ngaliyan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=9/4 x 100%	15=10/5 x 100%	16=11/6 x 100%	17=12/7 x 100%	18=13/8 x 100%
	Ketentraman dan Ketertiban Umum																
f.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	-	-	60,00%	70,00%	80,00%	-	-	60,00%	92,00%	100,00 %	-	-	100,00%	132,43%	125%
3.	**Indikator Program :**																
a.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
b.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
c.	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
d.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persen	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
e.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
g.	Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	Persen	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
h.	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	Persen	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
i.	Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan RT	Persen	88,00%	100,00 %	-	-	-	88,00%	100,00 %	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
j.	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Angka	316 Bidang Tanah	319 Bidang Tanah	-	-	-	316 Bidang Tanah	319 Bidang Tanah	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Ngaliyan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=9/4 x 100%	15=10/5 x 100%	16=11/6 x 100%	17=12/7 x 100%	18=13/8 x 100%
k.	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	Angka	1 Kelurahan	2 Kelurahan	-	-	-	N/A	2 Kelurahan	-	-	-	N/A	100,00%	-	-	-
l.	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan Kelurahan)	Angka	76 Kegiatan	80 Kegiatan	-	-	-	44 Kegiatan	80 Kegiatan	-	-	-	57,00%	100,00%	-	-	-
m.	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	Persen	53,00%	55,00%	-	-	-	53,00%	58,00%	-	-	-	100,00%	105,40%	-	-	-
n.	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	Persen	98,87%	95,00%	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	101,14%	105,00%	-	-	-
o.	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	Persen	92,63%	99,50%	-	-	-	98,00%	100,00 %	-	-	-	105,79%	100,05%	-	-	-
p.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar PATEN	Angka	1 Kelurahan	10 Kelurahan	-	-	-	1 Kelurahan	10 Kelurahan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
q.	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	Angka	6,500 Pelayanan	7,000 Pelayanan	-	-	-	7,021 Pelayanan	7,052 Pelayanan -	-	-	-	114,37%	100,74%	-	-	-
r.	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	Angka	10 Kelurahan	10 Kelurahan	-	-	-	10 Kelurahan	10 Kelurahan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
s.	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
t.	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang	Persen	94,31%	95,69%	-	-	-	95,21%	68,40%	-	-	-	100,95%	71,48%	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Ngaliyan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=9/4 x 100%	15=10/5 x 100%	16=11/6 x 100%	17=12/7 x 100%	18=13/8 x 100%
	Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan																
u.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persen	-	85,00%	91,00%	92,00%	93,00%	-	85,00%	100,00 %	100,00 %	93,70%	-	100,00%	109,89%	108,69%	100,75%
v.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	-	95,00%	97,00 %	98,00%	99,00%	-	95,00%	99,64 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00%	102,72%	102,04%	101,01%
w.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	0,00%	30,00%	15,00%	20,00%	-	0,00%	10,00 %	44,05%	55,56%	-	0,00%	12,00%	293,66%	277,80%
x.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	-	85,00%	100,00 %	92,00%	95,00%	-	85,00%	90,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	94,44%	90,00%	108,69%	105,26%
4.	**Indikator lainnya:**																
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	N/A	90,21%	-	-	-	-	90,21 %	-	-	-	N/A	100,00%	-	-	-
b.	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persen	-	-	11,14 %	10,52%	9,9%	-	-	11,00%	10,00%	5,00%	-	-	101,27%	105,52%	198,00%
c.	Nilai AKIP Kecamatan Ngaliyan	Nilai	74,50	75,00	75,50	76,00	76,50	74,53	74,71	71,61	73,40	71,50	100,04%	99,21%	94,85%	96,58%	93,46%

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 2025

2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Ngaliyan

Pada bagian ini disajikan uraian mengenai alokasi anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Ngaliyan selama periode 2020–2024. Data yang ditampilkan tidak hanya mencakup besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasi yang dicapai setiap tahunnya, tetapi juga rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dari tahun ke tahun, serta rasio ketercapaian antara anggaran dengan realisasi. Penyajian data ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan kecamatan, baik dari sisi konsistensi perencanaan, efektivitas pelaksanaan, maupun efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat perbedaan capaian pada setiap tahun, di mana terdapat periode dengan kinerja realisasi yang tinggi—ditunjukkan oleh rasio realisasi terhadap anggaran yang mendekati atau mencapai 100 persen—serta periode lain dengan capaian yang relatif lebih rendah. Informasi mengenai pertumbuhan anggaran dan realisasi juga memberikan indikasi adanya peningkatan maupun penurunan tren pendanaan, yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan di tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, pengelolaan anggaran Kecamatan Ngaliyan menunjukkan kecenderungan positif, meskipun masih ditemui variasi antar program maupun antar periode. Faktor-faktor seperti ketepatan perencanaan kegiatan, kapasitas pelaksanaan, serta dinamika kebutuhan masyarakat menjadi unsur penting yang memengaruhi tingkat realisasi. Dengan demikian, hasil evaluasi terhadap alokasi, realisasi, pertumbuhan, dan rasio ketercapaian anggaran pada periode 2020–2024 dapat menjadi pijakan dalam penyusunan strategi pengelolaan pendanaan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil di periode Renstra 2025–2029.

Secara rinci, kondisi anggaran, realisasi, rata-rata pertumbuhan, serta rasio realisasi terhadap anggaran Kecamatan Ngaliyan Tahun 2020–2024 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	901.255.000	0	0	0	0	899.755.199	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-0,2	-0,2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	188.970.000	0	0	0	0	188.876.650	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-0,2	-0,2
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	330.052.000	0	0	0	0	328.786.808	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-0,2	-0,2
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	172.700.000	0	0	0	0	172.629.380	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-0,2	-0,2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	26.637.000	0	0	0	0	22.608.550	0	0	0	0	85	0	0	0	0	-0,2	-0,2
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	3.995.665.000	0	0	0	0	3.921.444.120	0	0	0	0	98	0	0	0	0	-0,2	-0,2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.039.915.000	0	0	0	0	14.837.418.928	0	0	0	0	98,65	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	605.090.000	0	0	0	0	603.320.292	0	0	0	0	99,7	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Intensifikasi PAD	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,2	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	16.518.835.290	15.338.821.089	15.841.170.667	18.993.907.254	0	15.015.107.166	14.710.840.373	14.698.483.332	18.034.818.457	0	91	96	93	95	0,0321	0,0412
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	28.745.506.000	3.099.973.242	2.831.801.691	3.376.456.356	0	26.148.054.617	2.868.886.046	2.677.424.274	3.225.975.928	0	91	93	95	96	-0,1573	-0,1504
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	21.522.737.400	49.673.919.368	34.277.789.361	32.551.858.599	0	20.150.651.472	48.962.761.548	33.895.129.161	31.768.963.693	0	94	99	99	98	0,1895	0,2119
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	210.200.000.00	31.375.000	59.683.000	81.896.200	0	204.261.580.00	29.325.000	51.711.300	62.140.000	0	97	93	87	76	0,0847	0,0217
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	34.335.000	86.169.000	81.100.000	0	0	24.335.600	82.873.500	80.295.000	0	0	71	96	99	0,2902	0,4749

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Keterangan:

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N - Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

2.1.4 Mitra Kecamatan Ngaliyan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah. Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif. partisipatif. dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mitra Kecamatan Ngaliyan terbagi dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

1. Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan
   Sebagai mitra langsung di wilayah. kelurahan dan lembaga seperti RT/RW. LPMK. PKK. karang taruna. dan forum anak merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan di tingkat paling bawah. Mereka berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat. mendukung pelaksanaan program pembangunan. dan menyampaikan informasi layanan secara cepat dan akurat.
2. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam)
   Kecamatan Ngaliyan menjalin sinergi dengan instansi vertikal seperti Polsek. Koramil. dan KUA dalam mendukung keamanan. ketertiban. dan pelayanan lintas sektor.
3. Fasilitas Pendidikan. Kesehatan. dan Keagamaan
   Sekolah. puskesmas. rumah sakit. masjid. gereja. dan tempat ibadah lainnya menjadi mitra penting dalam pembinaan masyarakat. kampanye kesehatan. serta penguatan nilai-nilai sosial dan moral. Kerja sama dalam program edukasi. imunisasi. dan pemberdayaan remaja turut memperkuat peran kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
4. Pelaku Dunia Usaha dan UMKM
   Dunia usaha. koperasi. dan pelaku UMKM lokal menjadi mitra dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Kecamatan berperan dalam memfasilitasi pelatihan. promosi produk. pengurusan perizinan. serta mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung pembangunan wilayah.

Melalui kemitraan yang solid dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kecamatan Ngaliyan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat. akurat. dan menyeluruh. Kemitraan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi dalam mewujudkan Kecamatan Ngaliyan yang mandiri. berdaya saing. dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.5 Inovasi Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan memiliki inovasi unggulan bernama **Edufarm Park**. sebuah wahana edukasi pertanian perkotaan (urban farming) yang mengusung slogan *"Menanam dengan Cinta. Memanen dengan Sukacita"*. Program ini lahir sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan ketahanan pangan. mengendalikan inflasi. serta meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat.

Berlokasi di area sekitar Kantor Kecamatan Ngaliyan. Edufarm Park memanfaatkan lahan terbatas menjadi pusat edukasi dan

praktik pertanian perkotaan yang produktif. ramah lingkungan. dan berkelanjutan. Sejak diluncurkan pada tahun 2023. Edufarm Park telah menjadi rujukan studi tiru dan lokasi pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat. mulai dari pelajar. komunitas pemuda. PKK. hingga kelompok tani/kelompok wanita tani.

Konsep Edufarm Park tidak hanya berfokus pada budidaya tanaman. tetapi juga mengintegrasikan pengolahan hasil dan pemasaran. melalui tema **GERBANG MAPAN** (*Gerakan Urban Farming dari Hulu ke Hilir Mengajak Masyarakat Peduli terhadap Lingkungan*). Berbagai teknik budidaya digunakan. seperti hidroponik. vertikultur. tabulampot. dan budikdamber. dengan beragam komoditas mulai dari sayuran. tanaman toga. buah-buahan. hingga jamur tiram.

Selain itu. Edufarm Park menginisiasi program-program turunan seperti:

- **PANAH RANTING** (*Panen Berkah Perangi Stunting*) – menyediakan hasil panen untuk membantu penanganan stunting.
- **PARI KETAN** (*Pangan Mandiri Keluarga Rentan*) – mendukung kemandirian pangan keluarga kurang mampu.
- **Gesang** (*Gerakan Sedekah Sayang Ngaliyan*) – kegiatan sedekah pegawai kecamatan setiap Jumat untuk menyediakan makanan bergizi bagi balita rawan stunting.
- Program budidaya jamur tiram. irigasi tetes. pertanian terpadu. dan bank pupuk.

Dengan dukungan TP PKK. perangkat kelurahan. penyuluh pertanian. serta stakeholder terkait. Edufarm Park telah melatih ratusan peserta dan menginspirasi replikasi di kelurahan-kelurahan.

2.1.6 Penghargaan Kecamatan Ngaliyan

Inovasi Edufarm Park dan kinerja Kecamatan Ngaliyan telah mendapatkan apresiasi dalam berbagai ajang. antara lain:

Tahun 2023
- Juara 3 *Urban Farming Champion* Tingkat Kota Semarang.
- Juara 1 *Lomba Mbak Ita Mesem* (Kreativitas Tanam Cabai. Tomat. dan Melon Semarang).

Tahun 2024
- Juara 1 *Urban Farming Champion* Tingkat Kota Semarang.

Tahun 2025
- Juara 2 *Urban Farming Champion* Tingkat Kota Semarang.

Rangkaian prestasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen Kecamatan Ngaliyan dalam mengembangkan inovasi pelayanan

publik. memberdayakan masyarakat. dan mewujudkan ketahanan pangan di wilayah perkotaan.

2.1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Ngaliyan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. **Tantangan**

Pergantian kepemimpinan nasional. seperti dengan hadirnya presiden baru. seringkali membawa perubahan kebijakan. prioritas. dan arah pembangunan. termasuk pada tingkat pemerintahan kecamatan. Tantangan utama dalam pengembangan pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi adaptasi terhadap kebijakan baru. terutama jika terdapat perubahan signifikan dalam arah pembangunan atau regulasi yang memengaruhi mekanisme pelayanan. Kecamatan juga menghadapi tantangan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. terutama jika program nasional baru memerlukan sinergi lintas sektor yang kompleks.

Selain itu. keterbatasan sumber daya. baik dari segi anggaran. infrastruktur. maupun kompetensi aparatur. menjadi hambatan yang sering muncul. terlebih jika tuntutan pelayanan publik semakin meningkat. Faktor lain adalah kebutuhan meningkatkan partisipasi masyarakat. khususnya dalam merespons kebijakan baru. agar program yang dijalankan lebih inklusif dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan tantangan tersebut. kecamatan perlu fleksibel dalam berinovasi. memperkuat kapasitas internal. serta meningkatkan kolaborasi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah dinamika pemerintahan yang baru.

b. **Peluang**

Meskipun tantangan pengembangan pelayanan publik di tingkat kecamatan meningkat dengan adanya pergantian kepemimpinan nasional. hal ini juga membuka berbagai peluang. Perubahan kebijakan dan prioritas nasional seringkali disertai dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program strategis. yang dapat dimanfaatkan oleh kecamatan untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan publik. Selain itu. tantangan adaptasi kebijakan mendorong kecamatan untuk lebih proaktif dan inovatif dalam mengembangkan sistem pelayanan. misalnya melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi.

Koordinasi lintas sektor yang diperlukan dapat menjadi peluang untuk membangun jaringan kerja yang lebih kuat antara pemerintah pusat. daerah. dan masyarakat lokal. sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program. Selain itu. peningkatan tuntutan pelayanan juga dapat memacu pengembangan kompetensi aparatur kecamatan melalui pelatihan atau pendidikan. Dengan memanfaatkan peluang ini.

kecamatan tidak hanya dapat mengatasi tantangan yang ada tetapi juga memperkuat perannya sebagai ujung tombak pelayanan publik yang responsif dan inklusif di tingkat lokal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ngaliyan

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran. perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu. kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Ngaliyan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Ngaliyan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Ngaliyan telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dilakukan dengan menelaah capaian kinerja saat ini serta memperhatikan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029 disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah **“Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan”**. Permasalahan utama tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua pokok permasalahan, di mana Kecamatan Ngaliyan berkaitan dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **“Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan”**.

Pokok permasalahan ini memiliki tiga akar permasalahan, yakni: akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik masih perlu diperkuat, akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, serta inovasi dalam pelayanan publik masih terbatas.

Dari ketiga akar permasalahan tersebut, yang berhubungan langsung dengan pelayanan Kecamatan Ngaliyan adalah “**akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan”**. Selanjutnya, dengan memperhatikan analisis capaian kinerja periode 2020–2024 serta hasil identifikasi permasalahan Kota Semarang, dapat dirumuskan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagaimana berikut:

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif

   Data yang tersedia menunjukkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif pada periode 2020–2024 mengalami peningkatan, meskipun capaian awal belum optimal. Pada Tahun 2020 dan 2021 persentase yang dicapai masih sebesar 80,00%, kemudian meningkat menjadi 100,00% pada Tahun 2022 hingga 2024 dan bertahan stabil pada angka tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemajuan signifikan, namun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi

peran serta keberlanjutan partisipasi lembaga kemasyarakatan di lapangan.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum sepenuhnya optimal peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan agar kinerja yang sudah meningkat dapat terus dipertahankan dan dikembangkan.

b. Dalam periode 2021–2024, persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Ngaliyan menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2022 capaian masih berada di angka 60,00%, kemudian naik menjadi 92,00% pada Tahun 2023, dan akhirnya mencapai 100,00% pada Tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan masih perlu diperkuat agar konsistensi capaian dapat dipertahankan sekaligus diperluas manfaatnya.

   Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, serta mendorong peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

   Dari kondisi tersebut, akar permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan, serta masih terbatasnya sinergitas lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Ngaliyan.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Ngaliyan;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Ngaliyan;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Ngaliyan;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Ngaliyan;

c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Ngaliyan;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Ngaliyan;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Ngaliyan;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Ngaliyan;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Ngaliyan;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Ngaliyan;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Ngaliyan.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya kinerja kelembagaan. pelayanan. dan pemberdayaan di Kecamatan Ngaliyan”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Ngaliyan	Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Ngaliyan
		Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Ngaliyan
		Belum optimalnya kualitas perencanaan. Evaluasi dan keuangan Kecamatan Ngaliyan
2.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Ngaliyan	Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Ngaliyan
		Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan
		Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Ngaliyan
		Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Ngaliyan
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Ngaliyan
3.	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Ngaliyan
		Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan
		Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Ngaliyan

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

2.2.2.1 Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

2.2.2.2 Telaahan Visi. Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam menyusun rencana strategi pembangunan untuk lima tahun kedepan harus selaras dengan visi misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih. Berdasarkan visi dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah pada RPJMD Kota Semarang periode sebelumnya, serta mempertimbangkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025 – 2029, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 adalah :

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan rasio gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan

menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas ekspor- impor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang

bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

a. Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
b. Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
c. Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
d. Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi **"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif"**, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang.

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar

hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan

normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan masal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem e- budgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pembangunan Kota Semarang 5 (lima) tahun dari 2025 sampai dengan 2029 merupakan perjalanan yang panjang. Terdapat berbagai macam potensi yang perlu dikembangkan maupun isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang harus diatasi yang akan bermunculan secara dinamis selamat periode tersebut. Berbagai kebijakan dan strategi akan diambil Kota Semarang dalam upayanya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Semarang.

Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Keberhasilan dari semua program pembangunan ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Setiap warga dari individu hingga komunitas memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk memberi masukan, mendukung, menjaga maupun mengevaluasi jalan pembangunan Kota Semarang.

Kolaborasi ini melibatkan berbagai aspek teknis, seperti perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat, integrasi sistem pelayanan publik untuk efisiensi dan transparansi, pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya komunikasi yang transparan dan kerjasama yang solid, setiap tantangan dapat diatasi dan setiap potensi dapat dikembangkan. Visi dan misi Kota Semarang didukung dengan tagline:

Tabel 2.6
Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat!	
Bangun Infrastruktur Berkualitas	Humanis dalam Melayani
Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan	Ekonomi Inklusif
Ramah Lingkungan	Budaya yang Dilestarikan
Sosial Harmonis Tanpa Konflik	Aksesibilitas Meningkat
Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin	Tangguh menghadapi Tantangan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Utamakan Kesejahteraan Bersama	

Gambar 2.2
Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Ngaliyan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Ngaliyan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan. perkiraan kebutuhan pelayanan. dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Ngaliyan dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW. Kecamatan Ngaliyan dapat menyusun

rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Program Kewilayahan RTRW Kota Semarang yang Relevan untuk Kecamatan Ngaliyan

No	Program Kewilayahan RTRW Kota Semarang	Relevansi bagi Kecamatan Ngaliyan
1	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Mendukung pelayanan perizinan. fasilitasi UMKM. dan pertumbuhan ekonomi lokal
2	Pengembangan kawasan industri dan pergudangan	Memerlukan koordinasi pelayanan administratif dan pengawasan pemanfaatan ruang
3	Peningkatan infrastruktur jalan antar-kecamatan (Ngaliyan–Mijen–Tugu)	Memperkuat konektivitas layanan publik dan mobilitas warga antarwilayah
4	Penataan kawasan permukiman dan pemukiman campuran	Terkait layanan kependudukan. pengelolaan kebersihan. dan ketertiban lingkungan
5	Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik	Mendorong peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan ruang sosial
6	Pengembangan sistem transportasi kawasan barat kota	Menjadi dasar perencanaan pelayanan pendukung moda transportasi umum dan pengaturan lalu lintas

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Ngaliyan.

Dalam sistem pengembangan wilayah Kota Semarang sebagaimana diatur dalam dokumen RTRW dan dipaparkan dalam dokumen pra ranwal Renstra. Kecamatan Ngaliyan dikategorikan dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) X. bersama dengan Kecamatan Tugu. Wilayah ini diarahkan sebagai zona pengembangan kegiatan perdagangan. jasa. dan industri. serta ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang strategis di bagian barat Kota Semarang.

Namun. dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting saat ini. Kecamatan Ngaliyan belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi secara rinci arah geografis pengembangan pelayanan. estimasi kebutuhan pelayanan. maupun prioritas spasial wilayah pelayanan kecamatan untuk lima tahun mendatang.

Hal ini dikarenakan belum terdapat indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang secara eksplisit mencantumkan program atau kegiatan pelayanan kecamatan dalam dokumen RTRW Kota Semarang.
Meskipun demikian. arah pengembangan wilayah BWK X yang ditetapkan dalam RTRW tetap menjadi dasar bagi Kecamatan Ngaliyan untuk menyusun program dan kegiatan yang adaptif terhadap dinamika ruang. terutama dalam mendukung fungsi pelayanan administratif. fasilitasi sosial-ekonomi. dan pengembangan kewilayahan.

2.2.2.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen perencanaan yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan. rencana. dan program perangkat daerah. Pelaksanaan KLHS berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan KLHS.

KLHS berfungsi untuk mengidentifikasi. menganalisis. dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu lingkungan hidup yang bersifat strategis. sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem. kualitas lingkungan. dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029. KLHS disusun untuk memastikan seluruh arah kebijakan dan program pembangunan telah mengakomodasi aspek perlindungan lingkungan. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. serta penguatan ketahanan lingkungan hidup.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain:

1) Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender;

3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah;
4) Peningkatanancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim;
5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan
7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (4) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan masalah strategis "**Belum optimalnya pelayanan public yang "transparan dan akuntabel**", dan isu strategis "**Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab**", seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Tema Isu KLHS terhadap Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Tata Kelola Kelembagaan	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
	2. Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Ngaliyan

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi organisasi dan perlu segera mendapat perhatian, karena berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan serta kualitas pelayanan publik. Bagi kecamatan, isu strategis erat kaitannya dengan bagaimana pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Penetapan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra agar arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar fokus pada prioritas yang relevan.

Dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029 ditetapkan tujuh isu strategis utama, yaitu: (1) peningkatan daya saing kota melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan dan sumber daya manusia; (2) penyediaan infrastruktur perkotaan dan konektivitas wilayah yang berkualitas; (3) peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat; (4) penyediaan pelayanan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas; (5) pemenuhan kebutuhan dasar untuk

peningkatan taraf hidup masyarakat; (6) peningkatan daya dukung dan daya tampung kota; serta (7) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dari ketujuh isu tersebut, yang paling relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, di mana peningkatan kualitas kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan hasil telaahan atas berbagai aspek, baik permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngaliyan, potensi dan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan, visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kesesuaian dengan RTRW, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), maupun isu-isu strategis dalam RPJMD Kota Semarang, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang relevan bagi Kecamatan Ngaliyan. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan program kerja Renstra Kecamatan Ngaliyan Tahun 2025–2029, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Isu Perangkat Daerah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis Daerah	Isu Startegis PD
				Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Ngaliyan	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	Perkembangan teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelnggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Ngaliyan
		belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Ngaliyan						Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan
		belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan						peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ngaliyan

Sumber: Dokumen RPJMN 2025–2029. Dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029

BAB III
TUJUAN. SASARAN. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), visi dan misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang harus berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2) juga menegaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah wajib memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan kewenangan dan fungsi perangkat daerah.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Renstra Kecamatan Ngaliyan menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Semarang ke dalam program dan kegiatan yang relevan di tingkat kecamatan. Renstra Kecamatan berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjembatani antara arah kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dengan kebutuhan dan prioritas pelayanan masyarakat yang bersifat mikro. Oleh karena itu, seluruh tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Renstra ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Semarang sekaligus menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Lebih lanjut, Renstra Kecamatan Ngaliyan periode 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya (2021–2026), perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, hasil telaahan isu strategis kota maupun kecamatan, serta potensi dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman kerja aparatur kecamatan dalam lima tahun ke depan, tetapi juga sebagai komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

2.3 Tujuan Renstra Kecamatan Ngaliyan

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, kecamatan memiliki peran penting sebagai perangkat daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah. Renstra kecamatan berfungsi untuk menerjemahkan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Dengan adanya Renstra, arah pembangunan di kecamatan diharapkan lebih terarah, terukur, dan konsisten dengan dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi.

Tujuan pembangunan Kecamatan Ngaliyan dalam periode Renstra 2025–2029 adalah:

“Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan.”

Tujuan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah kecamatan.

Dengan perumusan tujuan tersebut, Kecamatan Ngaliyan berkomitmen untuk tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan internal, tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Sinergi antara peningkatan tata kelola pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan pelayanan yang lebih optimal, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta menciptakan lingkungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan ketercapaian tujuan tersebut, diperlukan indikator yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan program dan kegiatan yang dijalankan, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan strategi penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. Indikator tujuan Kecamatan Ngaliyan adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Ngaliyan**
   Indeks ini mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kecamatan, baik pelayanan yang dilakukan di kantor maupun pelayanan di luar kantor. Perhitungan indeks dilakukan dengan menggunakan agregat dari beberapa komponen, yaitu capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Asikmas sebesar 60%, tingkat efektivitas kecamatan dalam menangani pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum sebesar 20%, serta pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebesar 20%. Dengan komposisi tersebut, indeks ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pelayanan kecamatan dari berbagai aspek yang relevan.

2. **Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan**
   Indikator ini mengukur sejauh mana lembaga kemasyarakatan berperan dalam mendukung pembangunan di wilayah kecamatan. Perhitungan dilakukan melalui agregat dari tiga aspek, yaitu keberadaan dan aktivitas kepengurusan lembaga kemasyarakatan sebesar 20%, partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebesar 30%, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan yang memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebesar 50%. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis komunitas.

Dengan adanya kedua indikator tersebut, pencapaian tujuan dapat dipantau secara objektif dan terukur. Hasil pengukuran indikator juga akan menjadi dasar evaluasi dalam memperbaiki kebijakan serta meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

2.4 Sasaran Renstra Kecamatan Ngaliyan

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kecamatan Ngaliyan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029, diperlukan sasaran yang lebih terukur, spesifik, dan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran berfungsi sebagai penjabaran dari tujuan, sekaligus menjadi arah yang lebih operasional untuk memandu pencapaian kinerja kecamatan. Penetapan sasaran ini juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa tujuan yang bersifat umum dapat diterjemahkan menjadi capaian yang nyata dan dapat dievaluasi secara periodik.

Sasaran Renstra Kecamatan Ngaliyan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya yang memberikan gambaran mengenai capaian, kendala, maupun peluang perbaikan pelayanan di kecamatan. Kedua, penyesuaian terhadap visi, misi, dan tujuan pembangunan Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, sehingga arah kebijakan kecamatan tetap selaras dengan dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi. Ketiga, kebutuhan nyata masyarakat di wilayah Kecamatan Ngaliyan yang mencakup pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan.

Dengan dasar tersebut, sasaran yang dirumuskan diharapkan dapat memberikan fokus pada aspek pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, serta partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan. Sasaran juga dilengkapi dengan indikator, definisi operasional, dan formula perhitungan yang jelas agar capaian dapat diukur secara objektif. Sasaran Renstra Kecamatan Ngaliyan Tahun 2025–2029 meliputi:

9. **Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan**

   Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja kecamatan serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Indikator yang digunakan adalah:

   a. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ngaliyan**, yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian AKIP dihitung berdasarkan komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal kecamatan.
   b. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngaliyan**, yang diperoleh melalui aplikasi Asikmas Bagian Organisasi dan dihitung berdasarkan pedoman survei kepuasan masyarakat sesuai Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

   Dengan dua indikator ini, sasaran pertama diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana kualitas kinerja perangkat kecamatan telah memenuhi standar akuntabilitas serta kepuasan masyarakat.

2. **Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan**
   Fokus sasaran kedua adalah memastikan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan adalah **Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Ngaliyan**, dengan definisi operasional sebagai tingkat pemenuhan pelayanan publik yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Formula perhitungannya adalah jumlah layanan kecamatan terkait pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum, serta wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan, kemudian dikalikan 100%. Melalui indikator ini, kinerja pelayanan publik diukur secara obyektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian layanan.

3. **Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan**
   Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan peran dan kontribusi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan di tingkat kecamatan. Indikator yang digunakan adalah **Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan**, dengan definisi operasional berupa penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survei kecamatan terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan. Formula perhitungannya adalah hasil survei kepuasan masyarakat terhadap lembaga kemasyarakatan, yang mencerminkan tingkat efektivitas peran lembaga tersebut dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan tujuan dan sasaran beserta indikator yang telah dirumuskan, langkah berikutnya adalah menetapkan target capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk periode tahun 2025–2030 sebagaimana disajikan pada bagian berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA							Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat												
	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan	Angka	N/A	95,80	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ngaliyan	Angka	71,50	76,50	76,51	76,52	76,53	76,54	76,55	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngaliyan	Angka	93,10	93,25	93,33	93,67	94,00	94,33	94,67	
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Ngaliyan	Persen	N/A	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Angka	N/A	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA							Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Kecamatan Ngaliyan									
	Meningkatnya partisipasi *stakeholder* dalam pembangunan di Kota Semarang											
		SASARAN 3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	N/A	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

2.5 Strategi

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Ngaliyan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi. reformasi. maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan. tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat. termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi. sistem manajemen. serta pemanfaatan teknologi informasi.

2.5.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal. yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur. mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Ngaliyan dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Startegi Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	Memaksimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	Menguatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	Menguatkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan	Penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan	Percepatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan	Percepatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan	Perwujudan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 2025

2.5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Ngaliyan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Ngaliyan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda. namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Ngaliyan Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Ngaliyan	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Ngaliyan	
			Peningkatan kualitas perencanaan. evaluasi dan keuangan Kecamatan Ngaliyan	
			Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Ngaliyan	
			Peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	
			Peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Ngaliyan	
			Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			ketertiban umum masyarakat Kecamatan Ngaliyan	
			Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Ngaliyan	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan	
			Peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Ngaliyan	
			Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan	
			Peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Ngaliyan	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 2025

Rangkaian hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025–2029 dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan	Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	1. Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Ngaliyan
			2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Ngaliyan
			3. Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Ngaliyan
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan	1. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Ngaliyan
			2. Peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan
			4. Peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Ngaliyan
			5. Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Ngaliyan
			6. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Ngaliyan
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan	1. Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngaliyan
			2. Peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Ngaliyan
			3. Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan
			4. Peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Ngaliyan

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

2.6 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Ngaliyan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya. maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program. kegiatan. sub kegiatan. indikator kinerja. kelompok sasaran. lokasi. dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program. kegiatan. dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Ngaliyan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya. Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program. kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Ngaliyan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan				Indeks Kinerja layanan Kecamatan Ngaliyan		Camat
					Nilai Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan		
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ngaliyan (Angka)		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Angka)		Camat
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sekretaris Kecamatan
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngaliyan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Ngaliyan yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan	Staf Perencanaan,

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	7.01.01.2.02.0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0005 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Ngaliyan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Ngaliyan	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Ngaliyan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Ngaliyan yang selesai ditindaklanjuti	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Ngaliyan sesuai ketentuan	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
		Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			kebutuhan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Seksi Pemerintahan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayan Publik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Seksi Pelayan Publik
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bringin	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bringin
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bringin)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bringin)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bringin)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Bringin

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Kalipancur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalipancur	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kalipancur
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalipancur)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalipancur)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalipancur)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Kalipancur
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bambankerep	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bambankerep	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Bambankerep
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bambankerep)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bambankerep)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bambankerep)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Bambankerep
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Ngaliyan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngaliyan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Ngaliyan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngaliyan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngaliyan)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngaliyan)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Ngaliyan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Wates	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wates	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Wates
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wates)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wates)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wates)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Wates
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Tambakaji	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambakaji	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Tambakaji
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakaji)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakaji)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakaji)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Tambakaji
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Wonosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonosari	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Wonosari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonosari)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonosari)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Wonosari
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan	Lurah Podorejo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				menyeluruh pada Kelurahan Podorejo	Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Podorejo	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Podorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Podorejo)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Podorejo)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Podorejo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Purwoyoso	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwoyoso	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Purwoyoso
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwoyoso)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwoyoso)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwoyoso)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Purwoyoso
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Gondoriyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gondoriyo	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Gondoriyo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gondoriyo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gondoriyo)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gondoriyo)	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Gondoriyo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat pada Kecamatan Ngaliyan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kecamatan Ngaliyan	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kepala Seksi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kecamatan Ngaliyan)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staf Seksi Pembangunan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Bringin	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bringin
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bringin)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bringin)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bringin)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/ Staf Kelurahan Bringin
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kalipancur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Kalipancur	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kalipancur
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalipancur)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalipancur)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalipancur)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/ Staf Kelurahan Kalipancur
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bambankerep	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bambankerep	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Bambankerep

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bambankerep)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bambankerep)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bambankerep)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/ Staf Kelurahan Bambankerep
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Ngaliyan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Ngaliyan	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Ngaliyan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngaliyan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngaliyan)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngaliyan)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/ Staf Kelurahan Ngaliyan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Wates	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Wates	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Wates
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wates)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wates)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wates)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/ Staf Kelurahan Wates
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Tambakaji	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Tambakaji	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tambakaji
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan	Sekretaris/Kasie Pembangunan/

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakaji)	Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakaji)	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakaji)	Staf Kelurahan Tambakaji
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Wonosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Wonosari	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Wonosari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonosari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonosari)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonosari)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/ Staf Kelurahan Wonosari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Podorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Podorejo	P7.01.02.2.04 elaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Podorejo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Podorejo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Podorejo)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Podorejo)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/ Staf Kelurahan Podorejo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Purwoyoso	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Purwoyoso	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Purwoyoso
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Purwoyoso)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Sekretaris/Kasie Pembangunan/ Staf Kelurahan Purwoyoso

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Dilimpahkan (Kelurahan Purwoyoso)		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Purwoyoso)	
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Gondoriyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Gondoriyo	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kepala Seksi Pembangunan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gondoriyo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gondoriyo)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gondoriyo)	Sekretaris/Kasie Pembangunan/ Staf Kelurahan Gondoriyo
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan
		Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Seksi Pembangunan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pada Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bringin	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bringin	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bringin
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bringin)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bringin)	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bringin)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Bringin
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kalipancur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalipancur	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kalipancur
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalipancur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalipancur)	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalipancur)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Kalipancur
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bambankerep	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bambankerep	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Bambankerep
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bambankerep)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bambankerep)	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bambankerep)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
							Kelurahan Bambankerep
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngaliyan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Ngaliyan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngaliyan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngaliyan)	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngaliyan)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Ngaliyan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wates	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wates	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Wates
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wates)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wates)	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wates)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Wates
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tambakaji	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tambakaji	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tambakaji
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakaji)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakaji)	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakaji)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Tambakaji
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wonosari	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Wonosari

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				pemberdayaan di Kelurahan Wonosari			
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonosari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonosari)	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonosari)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Wonosari
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Podorejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Podorejo	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Podorejo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Podorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Podorejo)	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Podorejo)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Podorejo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Purwoyoso	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Purwoyoso
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwoyoso)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwoyoso)	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwoyoso)	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Purwoyoso
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gondoriyo	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Gondoriyo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gondoriyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di	Sekretaris/Kasie Perekonomian dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
					di Kelurahan (Kelurahan Gondoriyo)	Kelurahan (Kelurahan Gondoriyo)	Kesejahteraan Sosial /Staf Kelurahan Gondoriyo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Ngaliyan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Ngaliyan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Lurah
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Ngaliyan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Ngaliyan)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bringin	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bringin	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bringin
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bringin)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bringin)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bringin)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Bringin
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalipancur	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalipancur	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kalipancur
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalipancur)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalipancur)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalipancur)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Kalipancur
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bambankerep	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bambankerep	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Bambankerep
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bambankerep)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bambankerep)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Bambankerep

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						(Kelurahan Bambankerep)	
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngaliyan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngaliyan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Ngaliyan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngaliyan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngaliyan)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngaliyan)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Ngaliyan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wates	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wates	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Wates
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wates)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wates)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wates)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Wates
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambakaji	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambakaji	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tambakaji
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakaji)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakaji)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakaji)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Tambakaji
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonosari	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Wonosari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonosari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonosari)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonosari)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Wonosari

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Podorejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Podorejo	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Podorejo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Podorejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Podorejo)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Podorejo)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Podorejo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwoyoso	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwoyoso	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Purwoyoso
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwoyoso)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwoyoso)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwoyoso)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Purwoyoso
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gondoriyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gondoriyo	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Gondoriyo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gondoriyo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gondoriyo)	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gondoriyo)	Sekretaris/Kasie Pemerintahan /Staf Kelurahan Gondoriyo
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 2025

2.7 Sub Kegiatan Prioritas

Perangkat Daerah Kecamatan Ngaliyan mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan responsif. berbasis riset. inovasi. dan partisipasi public. Penguatan layanan dasar di bidang SDM dan Pemenuhan infrastruktur dasar inklusif. dan Penguatan ekonomi lokal dan Penguatan ketahanan pangan berkelanjutan. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan**	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan**		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	**Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan**	**Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	**Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)**	**Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib**		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	**Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6.	**Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil**			
7.	**Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi**			
8.	**Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK**			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
9.	**Pengembangan Musrenbang Tematik**	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, sekaligus sebagai instrumen pemenuhan layanan Kecamatan Ngaliyan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang lebih operasional. Penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan berlandaskan pada strategi serta kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Setiap program dilengkapi dengan indikator outcome beserta target capaian dan pagu indikatif yang menggambarkan kebutuhan pendanaannya. Hal yang sama juga berlaku pada kegiatan dan subkegiatan, di mana masing-masing memiliki indikator output, target capaian, serta pagu indikatif yang disesuaikan dengan lingkup pelaksanaannya. Keterkaitan antara outcome program dengan output kegiatan dan subkegiatan menjadi penting, karena outcome mencerminkan manfaat jangka menengah yang dihasilkan dari berfungsinya output kegiatan dan subkegiatan tersebut.

Dalam proses penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, digunakan kerangka logis perencanaan kinerja dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Pemilihan program dan kegiatan juga diselaraskan dengan tugas serta fungsi organisasi kecamatan agar setiap unsur organisasi memiliki peran, kewenangan, dan capaian kinerja yang jelas.

Selanjutnya, penetapan indikator outcome program maupun indikator output kegiatan dan subkegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini mampu memastikan adanya keterpaduan antara program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kecamatan Ngaliyan. Rencana program beserta kegiatan dan subkegiatan tersebut kemudian ditahapkan dalam kurun waktu 2025–2029, lengkap dengan target capaian serta pagu indikatif anggaran sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan dan pendanaan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN				19.965.450.054		22.228.284.996		23.213.176.091		23.394.086.590		23.820.816.992	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				19.965.450.054		22.228.284.996		23.213.176.091		23.394.086.590		23.820.816.992	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas**	100%	100%	19.965.450.054	100%	22.228.284.996	100%	23.213.176.091	100%	23.394.086.590	100%	23.820.816.992	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	96%	96.67	19.965.450.054	97%	22.228.284.996	97.33%	23.213.176.091	97.67%	23.394.086.590	98%	23.820.816.992	
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				69.686.610		79.170.942		85.678.069		76.829.488		76.829.488	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngaliyan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Ngaliyan yang sesuai peraturan perundangan**	100%	100%	69.686.610	100%	79.170.942	100%	85.678.069	100%	76.829.488	100%	76.829.488	
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen				60.027.030		69.028.382		75.028.382		66.179.801		66.179.801	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4 Dokumen	60.027.030	4 Dokumen	69.028.382	4 Dokumen	75.028.382	6 Dokumen	66.179.801	4 Dokumen	66.179.801	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.163.420		2.271.591		2.385.171		2.385.171		2.385.171	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.163.420	1 Dokumen	2.271.591	1 Dokumen	2.385.171	1 Dokumen	2.385.171	1 Dokumen	2.385.171	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.864.695		1.957.930		2.055.826		2.055.826		2.055.826	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.864.695	1 Dokumen	1.957.930	1 Dokumen	2.055.826	1 Dokumen	2.055.826	1 Dokumen	2.055.826	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.051.470		1.104.044		1.159.246		1.159.246		1.159.246	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.051.470	1 Dokumen	1.104.044	1 Dokumen	1.159.246	1 Dokumen	1.159.246	1 Dokumen	1.159.246	Kecamatan Ngaliyan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD												
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.313.445		1.379.117		1.448.073		1.448.073		1.448.073	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.313.445	1 Dokumen	1.379.117	1 Dokumen	1.448.073	1 Dokumen	1.448.073	1 Dokumen	1.448.073	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.308.530		2.423.957		2.545.154		2.545.154		2.545.154	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5 Laporan	2.308.530	5 Laporan	2.423.957	5 Laporan	2.545.154	5 Laporan	2.545.154	5 Laporan	2.545.154	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				958.020		1.005.921		1.056.217		1.056.217		1.056.217	
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1 Dokumen	958.020	1 Dokumen	1.005.921	1 Dokumen	1.056.217	1 Dokumen	1.056.217	1 Dokumen	1.056.217	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.538.055.186		18.533.608.320		19.480.163.383					
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang**	100%	100%	17.538.055.186	100%	18.533.608.320	100%	19.480.163.383	100%	20.245.083.315	100%	21.248.852.897	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
sesuai peraturan perundangan	**sesuai peraturan perundangan**												
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.175.447.099		18.034.140.374		18.935.767.522		19.882.475.228		20.876.517.514	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang /Bulan	105 Orang /bulan	17.175.447.099	105 Orang /bulan	18.034.140.374	105 Orang /bulan	18.935.767.522	105 Orang /bulan	19.882.475.228	105 Orang /bulan	20.876.517.514	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				360.014.797		496.224.990		540.926.758		360.014.797		369.742.093	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	360.014.797	12 Dokumen	496.224.990	12 Dokumen	540.926.758	12 Dokumen	360.014.797	12 Dokumen	369.742.093	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.02.0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				707.070		742.424		779.545		707.070		707.070	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	707.070	1 Laporan	742.424	1 Laporan	779.545	1 Laporan	707.070	1 Laporan	707.070	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.533.210		1.909.871		1.990.364		1.533.210		1.533.210	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	12 Laporan	1.533.210	12 Laporan	1.909.871	12 Laporan	1.990.364	12 Laporan	1.533.210	12 Laporan	1.533.210	Kecamatan Ngaliyan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
7.01.01.2.02.0005 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				353.010		590.661		699.194		353.010		353.010	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	353.010	1 Dokumen	590.661	1 Dokumen	699.194	1 Dokumen	353.010	1 Dokumen	353.010	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000		93.317.500		119.000.000		85.000.000		105.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Ngaliyan	**Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan**	-	90	35.000.000	91	93.317.500	92	119.000.000	93	85.000.000	94	105.000.000	
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000		43.317.500		39.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	43.317.500	4 Dokumen	39.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.000.000	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis				10.000.000		50.000.000		80.000.000		60.000.000		80.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	121 orang	10.000.000	121 orang	50.000.000	121 orang	80.000.000	121 orang	60.000.000	121 orang	80.000.000	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				459.731.887		944.130.981		950.277.386		904.158.236		624.158.236	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Ngaliyan**	100%	100%	459.731.887	100%	944.130.981	100%	950.277.386	100%	904.158.236	100%	624.158.236	
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.000.000		89.662.500		89.662.500		71.662.500		71.662.500	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	4 paket	65.000.000	4 paket	89.662.500	4 paket	89.662.500	4 paket	71.662.500	4 paket	71.662.500	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.778.092		29.616.996		29.616.996		18.497.846		18.497.846	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	16.778.092	6 Paket	29.616.996	6 Paket	29.616.996	6 Paket	18.497.846	6 Paket	18.497.846	Kecamatan Ngaliyan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.706.000		39.741.300		39.828.365		22.828.365		22.828.365	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	20.706.000	12 Laporan	39.741.300	12 Laporan	39.828.365	12 Laporan	22.828.365	12 Laporan	22.828.365	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115.416.000		391.186.800		397.246.140		397.246.140		127.246.140	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	115.416.000	12 Laporan	391.186.800	12 Laporan	397.246.140	12 Laporan	397.246.140	12 Laporan	127.246.140	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				241.831.795		393.923.385		393.923.385		393.923.385		383.923.385	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	241.831.795	4 Dokumen	393.923.385	4 Dokumen	393.923.385	4 Dokumen	393.923.385	4 Dokumen	383.923.385	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				194.000.000		297.000.000		297.000.000		297.000.000		267.000.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan**	100%	100%	194.000.000	100%	297.000.000	100%	297.000.000	100%	297.000.000	100%	267.000.000	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan				194.000.000		297.000.000		297.000.000		297.000.000		267.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peralatan dan Mesin Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	194.000.000	3 Unit	297.000.000	3 Unit	297.000.000	3 Unit	297.000.000	3 Unit	267.000.000	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				417.066.413		793.147.295		793.147.295		504.105.593		217.066.413	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Ngaliyan	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Ngaliyan yang selesai ditindaklanjuti**	100%	100%	417.066.413	100%	793.147.295	100%	793.147.295	100%	504.105.593	100%	217.066.413	
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				217.066.413		394.147.295		394.147.295		294.147.295		117.066.413	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	217.066.413	12 Laporan	394.147.295	12 Laporan	394.147.295	12 Laporan	294.147.295	12 Laporan	117.066.413	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000		399.000.000		399.000.000		209.958.298		100.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	399.000.000	12 Laporan	399.000.000	12 Laporan	209.958.298	12 Laporan	100.000.000	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.09 Pemeliharaan				1.251.909.958		1.487.909.958		1.487.909.958		1.281.909.958		1.281.909.958	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Ngaliyan sesuai ketentuan**	100%	100%	1.251.909.958	100%	1.487.909.958	100%	1.487.909.958	100%	1.281.909.958	100%	1.281.909.958	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				378.159.958		499.159.958		499.159.958		378.159.958		378.159.958	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	35 Unit	378.159.958	35 Unit	499.159.958	35 Unit	499.159.958	35 Unit	378.159.958	35 Unit	378.159.958	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		89.000.000		89.000.000		90.000.000		90.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10 unit	60.000.000	10 unit	89.000.000	10 unit	89.000.000	10 unit	90.000.000	10 unit	90.000.000	Kecamatan Ngaliyan
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				813.750.000		899.750.000		899.750.000		813.750.000		813.750.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5 Unit	813.750.000	5 Unit	899.750.000	5 Unit	899.750.000	5 Unit	813.750.000	5 Unit	813.750.000	Kecamatan Ngaliyan
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.982.011.267		4.403.290.637		4.586.651.029		4.620.331.727		4.699.777.520	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu**	100%	100%	3.982.011.267	100%	4.403.290.637	100%	4.586.651.029	100%	4.620.331.727	100%	4.699.777.520	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.518.518		4.244.443		4.381.666		4.930.749		5.149.792	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait**	100%	100%	3.518.518	100%	4.244.443	100%	4.381.666	100%	4.930.749	100%	5.149.792	
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	235.034.075	100%	273.208.468	100%	284.833.633	100%	286.833.633	100%	291.833.633	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3.518.518		4.244.443		4.381.666		4.930.749		5.149.792	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	1 Laporan	3.518.518	1 Laporan	4.244.443	1 Laporan	4.381.666	1 Laporan	4.930.749	1 Laporan	5.149.792	Kecamatan Ngaliyan
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				235.034.075		273.208.468		284.833.633		286.833.633		291.833.633	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	3 Dokumen	235.034.075	3 Dokumen	273.208.468	3 Dokumen	284.833.633	3 Dokumen	286.833.633	3 Dokumen	291.833.633	Kecamatan Ngaliyan
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1.163.682.545		1.232.366.672		1.295.085.005		1.311.892.965		1.362.119.715	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak**	100%	100%	1.163.682.545	100%	1.232.366.672	100%	1.295.085.005	100%	1.311.892.965	100%	1.362.119.715	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				187.182.545		207.041.672		218.493.755		221.472.155		225.177.865	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	187.182.545	12 Laporan	207.041.672	12 Laporan	218.493.755	12 Laporan	221.472.155	12 Laporan	225.177.865	Kecamatan Ngaliyan
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bringin	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bringin**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	109.042.081	100%	113.694.185	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bringin)													
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bringin)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	109.042.081	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Bringin
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Kalipancur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalipancur**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	109.042.081	100%	113.694.185	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalipancur)				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalipancur)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalipancur)	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	109.042.081	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Kalipancur
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				97.650.000		102.532.500		107.659.125		107.659.125		113.694.185	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bambankerep	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bambankerep**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	107.659.125	100%	113.694.185	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bambankerep)				97.650.000		102.532.500		107.659.125		107.659.125		113.694.185	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Bambankerep

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bambankerep)	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bambankerep)												
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Ngaliyan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngaliyan**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	109.042.081	100%	113.694.185	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngaliyan)				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngaliyan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	109.042.081	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Ngaliyan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Kelurahan Ngaliyan)												
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Wates	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wates**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	109.042.081	100%	113.694.185	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wates)				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wates)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wates)	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	109.042.081	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Wates
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Tambakaji	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambakaji**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	109.042.081	100%	113.694.185	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakaji)				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakaji)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakaji)	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	109.042.081	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Tambakaji
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
yang ada di Kecamatan													
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Wonosari	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonosari**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	109.042.081	100%	113.694.185	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonosari)				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonosari)	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	109.042.081	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Wonosari
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Terselenggaranya pelayanan publik	**Persentase Penyelenggaraan**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	109.042.081	100%	113.694.185	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Podorejo	**Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Podorejo**												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Podorejo)				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Podorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Podorejo)	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	109.042.081	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Podorejo
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Purwoyoso	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	109.042.081	100%	113.694.185	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwoyoso												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwoyoso)				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwoyoso)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwoyoso)	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	109.042.081	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Purwoyoso
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Gondoriyo	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di**	100%	100%	97.650.000	100%	102.532.500	100%	107.659.125	100%	109.042.081	100%	113.694.185	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kelurahan Gondoriyo												
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gondoriyo)				97.650.000		102.532.500		107.659.125		109.042.081		113.694.185	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gondoriyo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gondoriyo)	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	12 Laporan	102.532.500	12 Laporan	107.659.125	12 Laporan	109.042.081	12 Laporan	113.694.185	Kelurahan Gondoriyo
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				2.579.776.129		2.893.471.054		3.002.350.725		3.016.674.380		3.040.674.380	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat pada Kecamatan Ngaliyan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kecamatan Ngaliyan**	100%	100%	2.579.776.129	100%	2.893.471.054	100%	3.002.350.725	100%	3.016.674.380	100%	3.040.674.380	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				873.898.499		887.593.424		896.473.095		900.796.750		904.796.750	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kecamatan Ngaliyan)	12 laporan	12 Laporan	873.898.499	12 Laporan	887.593.424	12 Laporan	896.473.095	12 Laporan	900.796.750	12 Laporan	904.796.750	Kecamatan Ngaliyan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bringin	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Bringin**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bringin)				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bringin)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bringin)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Bringin
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kalipancur	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Kalipancur**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (kelurahan Kalipancur)				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalipancur)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalipancur)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Kalipancur
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bambankerep	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bambankerep**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (kelurahan Banbankerep)													
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bambankerep)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bambankerep)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Bambankerep
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Ngaliyan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Ngaliyan**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (kelurahan Ngaliyan)				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngaliyan)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Ngaliyan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(Kelurahan Ngaliyan)													
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Wates	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Wates**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (kelurahan Wates)				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wates)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wates)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Wates
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Tambakaji	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kelurahan Tambakaji												
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (kelurahan Tambakaji)				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakaji)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakaji)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Tambakaji
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Wonosari	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Wonosari**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (kelurahan Wonosari)				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonosari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonosari)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Wonosari
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Podorejo	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Podorejo**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (kelurahan Podorejo)				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Podorejo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Podorejo)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Podorejo
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
yang Dilimpahkan kepada Camat													
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Purwoyoso	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Purwoyoso**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (kelurahan Purwoyoso)				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Purwoyoso)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Purwoyoso)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Purwoyoso
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Gondoriyo	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Gondoriyo**	100%	100%	170.587.763	100%	200.587.763	100%	210.587.763	100%	211.587.763	100%	213.587.763	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan				170.587.763		200.587.763		210.587.763		211.587.763		213.587.763	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (kelurahan Gondoriyo)													
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gondoriyo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gondoriyo)	12 laporan	12 Laporan	170.587.763	12 Laporan	200.587.763	12 Laporan	210.587.763	12 Laporan	211.587.763	12 Laporan	213.587.763	Kelurahan Gondoriyo
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				176.839.961		195.548.855		203.691.836		205.187.586		208.715.751	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	**Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100%	100%	176.839.961	100%	195.548.855	100%	203.691.836	100%	205.187.586	100%	208.715.751	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				176.839.961		195.548.855		203.691.836		205.187.586		208.715.751	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	**Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib**	12 Kegiatan	12 Kegiatan	176.839.961	12 Kegiatan	195.548.855	12 Kegiatan	203.691.836	12 Kegiatan	205.187.586	12 Kegiatan	208.715.751	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				176.839.961		195.548.855		203.691.836		205.187.586		208.715.751	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	12 Laporan	176.839.961	12 Laporan	195.548.855	12 Laporan	203.691.836	12 Laporan	205.187.586	12 Laporan	208.715.751	Kecamatan Ngaliyan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				81.448.718		90.065.636		93.816.120		94.505.031		96.130.028	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	**Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	80%	82%	81.448.718	84%	90.065.636	86%	93.816.120	88%	94.505.031	90%	96.130.028	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				81.448.718		90.065.636		93.816.120		94.505.031		96.130.028	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	**Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan**	2 Kegiatan	2 Kegiatan	81.448.718	2 Kegiatan	90.065.636	2 Kegiatan	93.816.120	2 Kegiatan	94.505.031	2 Kegiatan	96.130.028	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,				81.448.718		90.065.636		93.816.120		94.505.031		96.130.028	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	81.448.718	200 Orang	90.065.636	200 Orang	93.816.120	200 Orang	94.505.031	200 Orang	96.130.028	Kecamatan Ngaliyan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				47.235.346.576		49.404.722.533		50.348.935.927		50.522.374.511		50.931.480.211	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	100%	100%	47.235.346.576	100%	49.404.722.533	100%	50.348.935.927	100%	50.522.374.511	100%	50.931.480.211	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.985.365.138		2.395.365.138		2.545.365.138		2.595.365.138		2.735.365.138	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	**Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan**	2 Laporan	2 Laporan	1.985.365.138	2 Laporan	2.395.365.138	2 Laporan	2.545.365.138	2 Laporan	2.595.365.138	2 Laporan	2.735.365.138	
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	236 Kegiatan	350 Kegiatan	11.996.400.000	350 Kegiatan	12.446.400.000	350 Kegiatan	12.496.400.000	350 Kegiatan	12.496.400.000	350 Kegiatan	12.496.400.000	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah				1.985.365.138		2.395.365.138		2.545.365.138		2.595.365.138		2.735.365.138	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga Kemasyarakatan	1.985.365.138	6 lembaga Kemasyarakatan	2.395.365.138	6 lembaga Kemasyarakatan	2.545.365.138	6 lembaga Kemasyarakatan	2.595.365.138	6 lembaga Kemasyarakatan	2.735.365.138	Kecamatan Ngaliyan
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.595.000.000		2.595.000.000		2.595.000.000		2.595.000.000		2.595.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pada Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.595.000.000	3 Pokmas / Ormas	2.595.000.000	3 Pokmas / Ormas	2.595.000.000	3 Pokmas / Ormas	2.595.000.000	3 Pokmas / Ormas	2.595.000.000	Kecamatan Ngaliyan
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				950.800.000		970.800.000		990.800.000		990.800.000		990.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bringin	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bringin**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	950.800.000	350 Kegiatan	970.800.000	350 Kegiatan	990.800.000	350 Kegiatan	990.800.000	350 Kegiatan	990.800.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bringin)				950.800.000		970.800.000		990.800.000		990.800.000		990.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bringin)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bringin)	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	950.800.000	3 Pokmas / Ormas	970.800.000	3 Pokmas / Ormas	990.800.000	3 Pokmas / Ormas	990.800.000	3 Pokmas / Ormas	990.800.000	Kelurahan Bringin

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				917.200.000		947.200.000		977.200.000		977.200.000		977.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kalipancur	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalipancur**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	917.200.000	350 Kegiatan	947.200.000	350 Kegiatan	977.200.000	350 Kegiatan	977.200.000	350 Kegiatan	977.200.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalipancur)				917.200.000		947.200.000		977.200.000		977.200.000		977.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalipancur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalipancur)	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	917.200.000	3 Pokmas / Ormas	947.200.000	3 Pokmas / Ormas	977.200.000	3 Pokmas / Ormas	977.200.000	3 Pokmas / Ormas	977.200.000	Kelurahan Kalipancur
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				983.600.000		993.600.000		993.600.000		993.600.000		993.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bambankerep	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bambankerep**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	983.600.000	350 Kegiatan	993.600.000	350 Kegiatan	993.600.000	350 Kegiatan	993.600.000	350 Kegiatan	993.600.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banbankerep)				983.600.000		993.600.000		993.600.000		993.600.000		993.600.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bambankerep)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bambankerep)	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	983.600.000	3 Pokmas / Ormas	993.600.000	3 Pokmas / Ormas	993.600.000	3 Pokmas / Ormas	993.600.000	3 Pokmas / Ormas	993.600.000	Kelurahan Bambankerep
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				900.400.000		980.400.000		980.400.000		980.400.000		980.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngaliyan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngaliyan**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	900.400.000	350 Kegiatan	980.400.000	350 Kegiatan	980.400.000	350 Kegiatan	980.400.000	350 Kegiatan	980.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngaliyan)				900.400.000		980.400.000		980.400.000		980.400.000		980.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngaliyan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngaliyan)	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	900.400.000	3 Pokmas / Ormas	980.400.000	3 Pokmas / Ormas	980.400.000	3 Pokmas / Ormas	980.400.000	3 Pokmas / Ormas	980.400.000	Kelurahan Ngaliyan
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				979.400.000		999.400.000		999.400.000		999.400.000		999.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wates	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wates**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	979.400.000	350 Kegiatan	999.400.000	350 Kegiatan	999.400.000	350 Kegiatan	999.400.000	350 Kegiatan	999.400.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wates)				979.400.000		999.400.000		999.400.000		999.400.000		999.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wates)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wates)	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	979.400.000	3 Pokmas / Ormas	999.400.000	3 Pokmas / Ormas	999.400.000	3 Pokmas / Ormas	999.400.000	3 Pokmas / Ormas	999.400.000	Kelurahan Wates
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				984.400.000		994.400.000		994.400.000		994.400.000		994.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tambakaji	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tambakaji**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	984.400.000	350 Kegiatan	994.400.000	350 Kegiatan	994.400.000	350 Kegiatan	994.400.000	350 Kegiatan	994.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakaji)				984.400.000		994.400.000		994.400.000		994.400.000		994.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakaji)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakaji)	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	984.400.000	3 Pokmas / Ormas	994.400.000	3 Pokmas / Ormas	994.400.000	3 Pokmas / Ormas	994.400.000	3 Pokmas / Ormas	994.400.000	Kelurahan Tambakaji
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				963.400.000		993.400.000		994.400.000		994.400.000		994.400.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wonosari	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wonosari**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	963.400.000	350 Kegiatan	993.400.000	350 Kegiatan	994.400.000	350 Kegiatan	994.400.000	350 Kegiatan	994.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonosari)				963.400.000		993.400.000		993.400.000		993.400.000		993.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonosari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonosari)	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	963.400.000	3 Pokmas / Ormas	993.400.000	3 Pokmas / Ormas	993.400.000	3 Pokmas / Ormas	993.400.000	3 Pokmas / Ormas	993.400.000	Kelurahan Wonosari
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				900.400.000		900.400.000		900.400.000		900.400.000		900.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Podorejo	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Podorejo**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	900.400.000	350 Kegiatan	900.400.000	350 Kegiatan	900.400.000	350 Kegiatan	900.400.000	350 Kegiatan	900.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Podorejo)				900.400.000		900.400.000		900.400.000		900.400.000		900.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	900.400.000	3 Pokmas / Ormas	990.400.000	3 Pokmas / Ormas	990.400.000	3 Pokmas / Ormas	990.400.000	3 Pokmas / Ormas	990.400.000	Kelurahan Podorejo

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(Kelurahan Podorejo)	Kelurahan (Kelurahan Podorejo)												
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				921.400.000		991.400.000		991.400.000		991.400.000		991.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Purwoyoso	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Purwoyoso**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	921.400.000	350 Kegiatan	991.400.000	350 Kegiatan	991.400.000	350 Kegiatan	991.400.000	350 Kegiatan	991.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwoyoso)				921.400.000		991.400.000		991.400.000		991.400.000		991.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwoyoso)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwoyoso)	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	921.400.000	3 Pokmas / Ormas	991.400.000	3 Pokmas / Ormas	991.400.000	3 Pokmas / Ormas	991.400.000	3 Pokmas / Ormas	991.400.000	Kelurahan Purwoyoso
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				900.400.000		990.400.000		990.400.000		990.400.000		990.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gondoriyo	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gondoriyo**	236 Kegiatan	350 Kegiatan	900.400.000	350 Kegiatan	990.400.000	350 Kegiatan	990.400.000	350 Kegiatan	990.400.000	350 Kegiatan	990.400.000	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				900.400.000		990.400.000		990.400.000		990.400.000		990.400.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(Kelurahan Gondoriyo)													
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gondoriyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gondoriyo)	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	900.400.000	3 Pokmas / Ormas	990.400.000	3 Pokmas / Ormas	990.400.000	3 Pokmas / Ormas	990.400.000	3 Pokmas / Ormas	990.400.000	Kelurahan Gondoriyo
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				30.109.800.027		30.640.015.444		31.371.581.741		31.372.240.872		31.418.428.147	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Ngaliyan	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Ngaliyan**	8 Laporan	4 Laporan	30.109.800.027	4 Laporan	30.640.015.444	4 Laporan	31.371.581.741	4 Laporan	31.372.240.872	4 Laporan	31.418.428.147	
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	**Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan**	100%	100%	1.493.781.411	100%	1.952.941.951	100%	1.955.589.048	100%	1.958.368.501	100%	1.961.286.926	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	**Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	100%	100%	1.650.000.000	100%	1.970.000.000	100%	1.980.000.000	100%	2.100.000.000	100%	2.320.000.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.127.000.000		4.127.000.000		4.127.000.000		4.127.000.000		4.127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Ngaliyan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasy	3 Lembaga Kemasy	4.127.000.000	3 Lembaga Kemasy	4.127.000.000	3 Lembaga Kemasy	4.127.000.000	3 Lembaga Kemasy	4.127.000.000	3 Lembaga Kemasy	4.127.000.000	Kecamatan Ngaliyan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Kecamatan Ngaliyan)	arakatan	arakatan		arakatan		arakatan		arakatan		arakatan		
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.862.400.000		3.962.400.000		3.962.400.000		3.962.400.000		3.962.400.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bringin	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bringin**	8 Laporan	4 Laporan	3.862.400.000	4 Laporan	3.962.400.000	4 Laporan	3.962.400.000	4 Laporan	3.962.400.000	4 Laporan	3.962.400.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Bringin)				3.862.400.000		3.962.400.000		3.962.400.000		3.962.400.000		3.962.400.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bringin)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bringin)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.862.400.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.962.400.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.962.400.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.962.400.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.962.400.000	Kelurahan Bringin
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.444.800.000		2.875.015.417		2.944.800.000		2.944.800.000		2.944.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalipancur	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalipancur**	8 Laporan	4 Laporan	2.444.800.000	4 Laporan	2.875.015.417	4 Laporan	2.944.800.000	4 Laporan	2.944.800.000	4 Laporan	2.944.800.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga				2.444.800.000		2.875.015.417		2.944.800.000		2.944.800.000		2.944.800.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kemasyarakatan (kelurahan Kalipancur)													
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalipancur)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalipancur)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.444.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.015.417	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.944.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.944.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.944.800.000	Kelurahan Kalipancur
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.237.000.000		2.237.000.000		2.237.000.000		2.237.000.000		2.237.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bambankerep	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bambankerep**	8 Laporan	4 Laporan	2.237.000.000	4 Laporan	2.237.000.000	4 Laporan	2.237.000.000	4 Laporan	2.237.000.000	4 Laporan	2.237.000.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Banbankerep)				2.237.000.000		2.237.000.000		2.237.000.000		2.237.000.000		2.237.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bambankerep)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bambankerep)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.237.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.237.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.237.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.237.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.237.000.000	Kelurahan Bambankerep
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.617.600.000		2.617.600.000		2.617.600.000		2.617.600.000		2.617.600.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngaliyan	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngaliyan**	8 Laporan	4 Laporan	2.617.600.000	4 Laporan	2.617.600.000	4 Laporan	2.617.600.000	4 Laporan	2.617.600.000	4 Laporan	2.617.600.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Ngaliyan)				2.617.600.000		2.617.600.000		2.617.600.000		2.617.600.000		2.617.600.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngaliyan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngaliyan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.617.600.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.617.600.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.617.600.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.617.600.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.617.600.000	Kelurahan Ngaliyan
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.336.800.000		2.336.800.000		2.936.800.000		2.936.800.000		2.936.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wates	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wates**	8 Laporan	4 Laporan	2.336.800.000	4 Laporan	2.336.800.000	4 Laporan	2.936.800.000	4 Laporan	2.936.800.000	4 Laporan	2.936.800.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Wates)				2.336.800.000		2.336.800.000		2.936.800.000		2.936.800.000		2.936.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wates)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wates)	9 Lembaga Kemasy	5 Lembaga Kemasy	2.336.800.000	5 Lembaga Kemasy	2.336.800.000	5 Lembaga Kemasy	2.936.800.000	5 Lembaga Kemasy	2.936.800.000	5 Lembaga Kemasy	2.936.800.000	Kelurahan Wates

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		arakatan	arakatan		arakatan		arakatan		arakatan		arakatan		
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.155.800.000		2.155.800.000		2.217.581.714		2.218.240.845		2.264.428.120	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambakaji	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambakaji**	8 Laporan	4 Laporan	2.155.800.000	4 Laporan	2.155.800.000	4 Laporan	2.217.581.714	4 Laporan	2.218.240.845	4 Laporan	2.264.428.120	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Tambakaji)				2.155.800.000		2.155.800.000		2.217.581.714		2.218.240.845		2.264.428.120	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakaji)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakaji)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.155.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.155.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.217.581.714	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.218.240.845	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.264.428.120	Kelurahan Tambakaji
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.749.800.000		2.749.800.000		2.749.800.000		2.749.800.000		2.749.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonosari	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonosari**	8 Laporan	4 Laporan	2.749.800.000	4 Laporan	2.749.800.000	4 Laporan	2.749.800.000	4 Laporan	2.749.800.000	4 Laporan	2.749.800.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Wonosari)				2.749.800.000		2.749.800.000		2.749.800.000		2.749.800.000		2.749.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonosari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.749.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.749.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.749.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.749.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.749.800.000	Kelurahan Wonosari
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.155.800.000		2.155.800.000		2.155.800.000		2.155.800.000		2.155.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Podorejo	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Podorejo**	8 Laporan	4 Laporan	2.155.800.000	4 Laporan	2.155.800.000	4 Laporan	2.155.800.000	4 Laporan	2.155.800.000	4 Laporan	2.155.800.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Podorejo)				2.155.800.000		2.155.800.000		2.155.800.000		2.155.800.000		2.155.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Podorejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Podorejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.155.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.155.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.155.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.155.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.155.800.000	Kelurahan Podorejo
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				2.776.600.000		2.776.600.000		2.776.600.000		2.776.600.000		2.776.600.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tingkat Kecamatan													
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwoyoso	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwoyoso**	8 Laporan	4 Laporan	2.776.600.000	4 Laporan	2.776.600.000	4 Laporan	2.776.600.000	4 Laporan	2.776.600.000	4 Laporan	2.776.600.000	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Purwoyoso)				2.776.600.000		2.776.600.000		2.776.600.000		2.776.600.000		2.776.600.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwoyoso)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwoyoso)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.776.600.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.776.600.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.776.600.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.776.600.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.776.600.000	Kelurahan Purwoyoso
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.646.200.027		2.646.200.027		2.646.200.027		2.646.200.027		2.646.200.027	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gondoriyo	**Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gondoriyo**	8 Laporan	4 Laporan	2.646.200.027	4 Laporan	2.646.200.027	4 Laporan	2.646.200.027	4 Laporan	2.646.200.027	4 Laporan	2.646.200.027	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Gondoriyo)				2.646.200.027		2.646.200.027		2.646.200.027		2.646.200.027		2.646.200.027	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gondoriyo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gondoriyo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.646.200.027	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.646.200.027	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.646.200.027	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.646.200.027	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.646.200.027	Kelurahan Gondoriyo
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				1.493.781.411		1.952.941.951		1.955.589.048		1.958.368.501		1.961.286.926	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.493.781.411	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.952.941.951	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.955.589.048	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.958.368.501	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.961.286.926	Kecamatan Ngaliyan
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1.650.000.000		1.970.000.000		1.980.000.000		2.100.000.000		2.320.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 laporan	2 laporan	1.650.000.000	2 laporan	1.970.000.000	2 laporan	1.980.000.000	2 laporan	2.100.000.000	2 laporan	2.320.000.000	Kecamatan Ngaliyan

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 2025

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No.	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp 53,880,000	Rp 65,194,800	Rp 71,714,280	Rp 78,885,708	Rp 86,774,278	Rp 95,451,706	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 53,880,000	Rp 65,194,800	Rp 71,714,280	Rp 78,885,708	Rp 86,774,278	Rp 95,451,706	
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp 53,880,000	Rp 65,194,800	Rp 71,714,280	Rp 78,885,708	Rp 86,774,278	Rp 95,451,706	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	Rp 53,880,000	Rp 65,194,800	Rp 71,714,280	Rp 78,885,708	Rp 86,774,278	Rp 95,451,706	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 2025

2.8 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*). tahap pelaksanaan (*on going*). maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis. terutama menyangkut *output. outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Ngaliyan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngaliyan yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	**Tujuan :** Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan									
2.		Indeks Kinerja layanan Kecamatan	Angka	95.80	96.00	96.20	96.40	96.60	96.80	
3.	**Sasaran 1 :** Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan									
4.		Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	88.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	
5.		Nilai Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kecamatan	Angka	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	
6.	**Sasaran 2 :** Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan									
7.		Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	79.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 2025

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
UNSUR KEWILAYAHAN									
1.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persen	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99,30	100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Ngaliyan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Ngaliyan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Ngaliyan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Ngaliyan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ngaliyan.

Permasalahan belum optimalnya kinerja kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian pembangunan wilayah Kecamatan Ngaliyan secara efektif, inklusif, dan partisipatif, sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Ngaliyan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Ngaliyan.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab, dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Ngaliyan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai akan dapat mewujudkan Kecamatan Ngaliyan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik., serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara optimal dan terpadu.

50. KECAMATAN GAYAMSARI

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta industri di wilayah Tengah Pulau Jawa. Dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat, diperlukan perencanaan Pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan urbanisasi, meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, serta memperkuat daya saing kota. Perencanaan ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya Semarang sebagai kota modern yang inklusif, Tangguh dan berwawasan lingkungan.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ktoa Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang maka Kecamatan Gayamsari wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khusunya bidang pelayanan kepada masyarakat, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Gayamsari Kota

Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.
26. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Gayamsari adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Urusan Penunjang Kewilayahan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gayamsari adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya Urusan Penunjang Kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gayamsari, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gayamsari. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Gayamsari yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Gayamsari yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator

kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi*

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, tugas pokok dari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah membantu Walikota/Bupati melaksanakan Urusan Penunjang Kewilayahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Gayamsari mempunyai fungsi:

a. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
b. Kecamatan merupakan pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
c. Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
d. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gayamsari telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

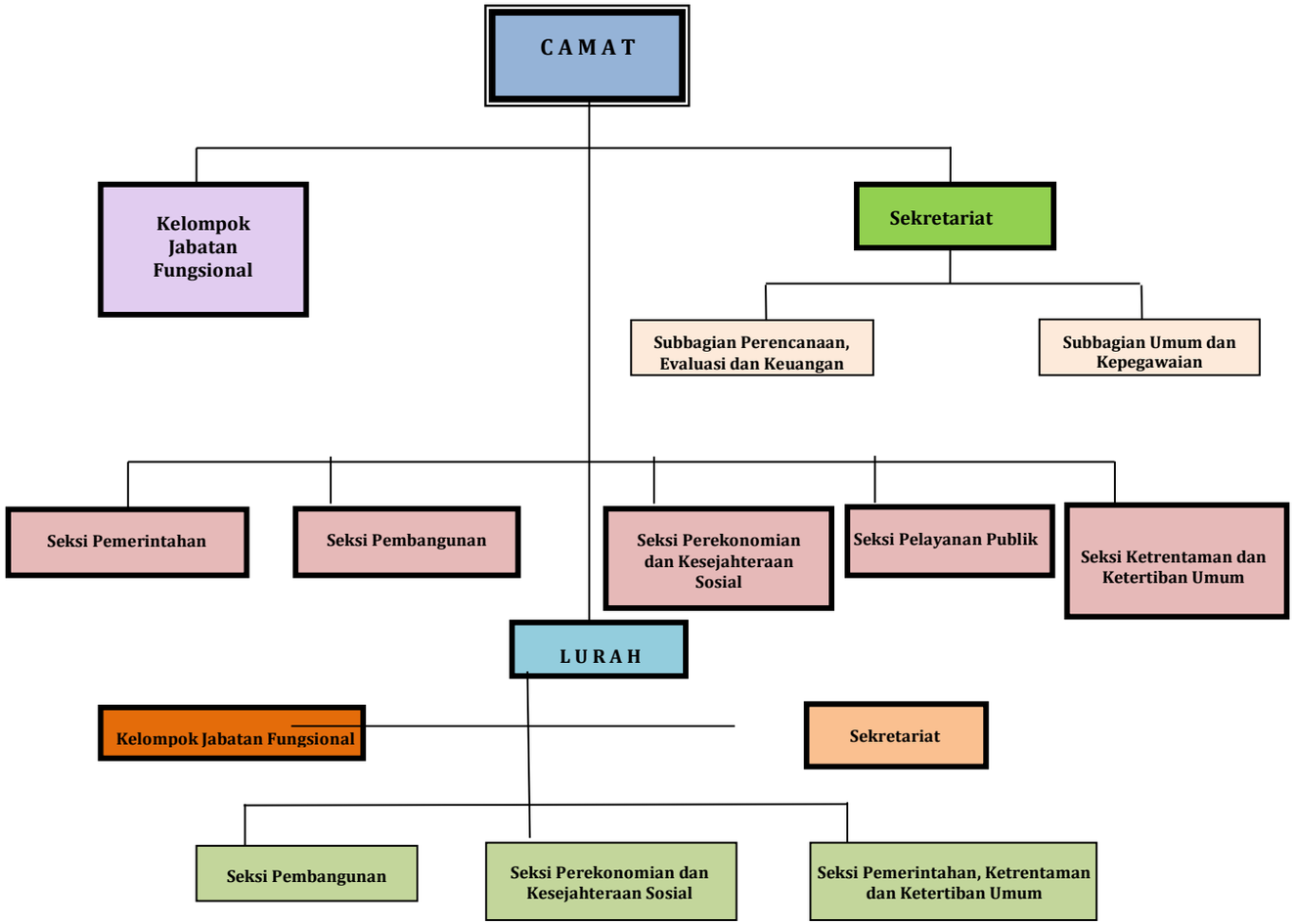

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Gayamsari

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Gayamsari, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Gayamsari adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

1) perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5) penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6) penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11) penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
15) penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16) penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
17) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian

dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;

18) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

19) penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Gayamsari menyelenggarakan fungsi :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   d) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   e) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
   g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
   h) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
   b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
   d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum, antara lain:
   a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:

a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

8) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
b) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
c) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
d) evaluasi Kelurahan.

9) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
a) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
b) Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
c) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
d) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
e) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
f) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
g) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;

h) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
i) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
j) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
k) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
l) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
a) pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
b) penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
c) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
d) pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan.

11) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
a) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
b) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
c) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
d) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
e) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

13) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
b) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
c) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

14) Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
7) pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
8) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
9) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
10) pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
11) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
12) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
13) pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
14) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
15) pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
16) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
17) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
18) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
19) pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
20) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
21) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
22) pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;
23) pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;

24) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
25) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
26) pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
27) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
28) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
29) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
30) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
6) menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
7) menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
10) menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
11) menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
13) menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
17) menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

18) menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
20) menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
22) menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
24) menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
25) menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
26) menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
27) menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
28) menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
29) menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
30) menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
32) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
34) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
35) menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;
36) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
37) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
38) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan; mm.menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
39) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
40) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;

41) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
6) menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
9) menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
10) menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
11) menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16) menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
17) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
18) menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
19) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);
20) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
21) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
22) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
23) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
24) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
25) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
28) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
29) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
30) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
32) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
33) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
8) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
11) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
13) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
14) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;

18) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
20) menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
21) menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
22) menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
23) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
25) menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
26) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
27) menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
28) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
29) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
30) menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
31) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
32) menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
33) menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
34) menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
35) menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
36) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
37) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
38) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
39) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
40) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
41) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

42) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
43) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
44) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
6) menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
7) menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
8) menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
11) menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
12) menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
14) menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
15) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
16) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
17) menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
18) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
19) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
20) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
21) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
22) menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;

24) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
26) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
27) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
8) menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
9) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
11) menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
12) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
13) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
15) menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
16) menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
17) menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
18) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;

20) menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum; u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
21) menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
23) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
24) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
25) menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26) menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
27) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
28) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
29) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
30) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
31) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
32) menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
33) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
34) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
35) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
37) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
38) menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
39) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
40) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2) pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
9) pelaksanaan kegiatan koordinasi;
10) pelaksanaan kegiatan sekretariat;
11) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
12) pelaksanaan kegiatan pembangunan;
13) pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
14) pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
15) pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
16) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
17) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
18) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
19) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
20) pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
21) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
    1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
    3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    4) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    5) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
    7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
   2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
   3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
   4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
   2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
   1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
   3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
   1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   2) pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
   3) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan

4) evaluasi Kelurahan;

i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
   1) pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   2) peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
   3) peningkatan ketahanan pangan keluarga;
   4) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
   5) peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
   6) peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
   7) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
   8) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
   9) penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
   10) pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
   11) pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
   12) penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
   1) pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
   2) penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
   3) pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
   4) Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
   1) penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
   2) peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
   3) penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
   4) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
   5) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
   1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
   2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan

4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;

n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan

o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. *Sumber Daya Kecamatan Gayamsari*

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 61 pegawai, dengan jumlah 59 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), yang terdiri dari 25 pegawai laki-laki (40,98%) dan 34 pegawai perempuan (59,02%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 33 pegawai, yang terdiri dari 23 pegawai Non ASN laki-laki (69,70%) dan 10 pegawai Non ASN perempuan (30,30%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah sebanyak 94 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Kecamatan Gayamsari didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 dan S1 sebanyak 31 orang (50,81%), D3 sebanyak 25 orang (40,98%), dan lulusan SMA sebanyak 5 orang (8,19%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 23 Orang (69,70%) lulusan SMA, dan sisanya 10 Orang (30,30%).

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Tahun 2024
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	**56**	**91,80**	**59,57**	**10**	**30,30**	**10,63**
1.	S2	10	16,39	10,63	0	0,00	0,00
2.	S1	21	34,42	22,34	0	0,00	0,00
3.	D3	25	40,98	26,59	10	30,30	10,63

Sumber:Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, per Desember 2024

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Bukan Perguruan Tinggi	**5**	**8,19**	**5,31**	**23**	**69,70**	**24,46**
4.	SLTA	5	8,19	5,31	23	69,70	24,46
Jumlah		**61**	**100,00**	**64,88**	**33**	**100,00**	**35,12**
Jumlah Seluruh Pegawai		**94 Pegawai**					

Sumber: Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, per Desember 2024

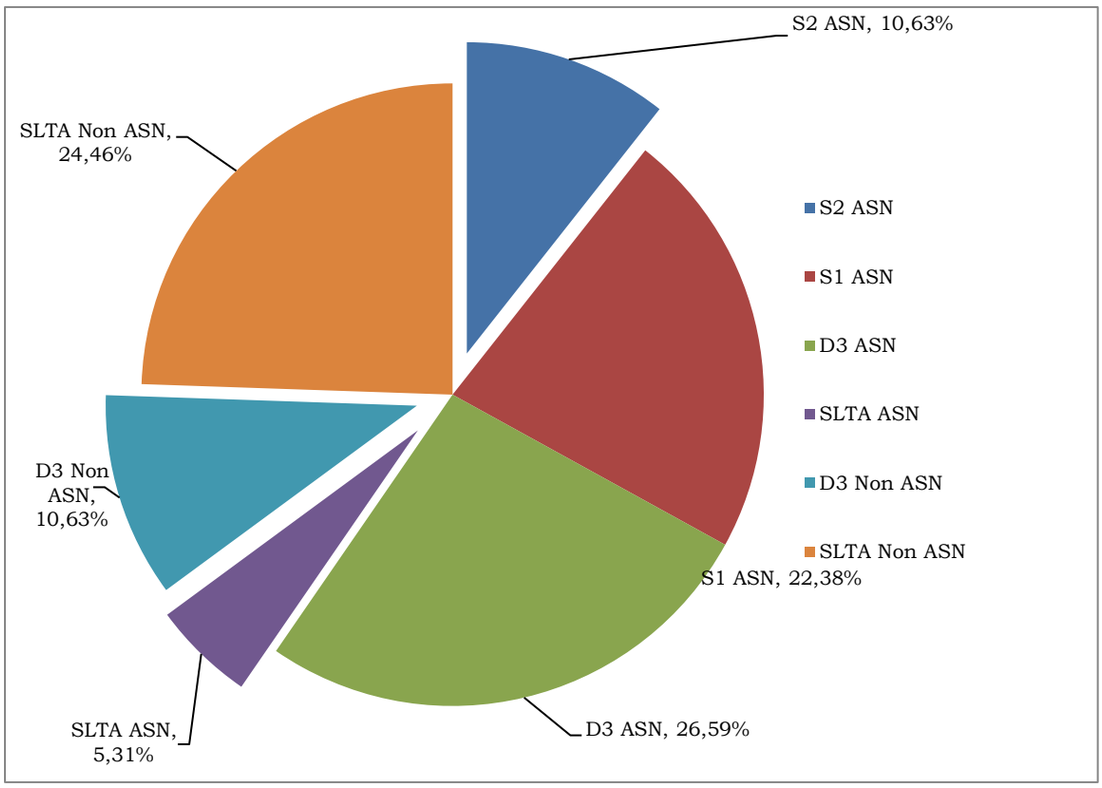

Gambar 2.2
Komposisi ASN dan Non ASN Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN Kelurahan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Jumlah ASN dan Non ASN per unit pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kecamatan/Kelurahan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kecamatan	3	4	16	20	-	-	38
2	Tambakrejo	-	3	4	1	-	-	8
3	Kaligawe	2	1	4	1	-	-	8

No	Kecamatan/Kelurahan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
4	Sawah Besar	2	2	2	2	-	-	8
5	Siwalan	-	4	1	1	-	-	6
6	Sambirejo	2	1	3	1	-	-	7
7	Pandean Lamper	1	2	3	1	-	-	8
8	Gayamsari	-	4	2	1	-	-	7
	Jumlah	**10**	**21**	**35**	**28**	**-**	**-**	**94**

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, per Desember 2024

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 5 pegawai (4,90%), golongan III sebanyak 68 pegawai (66,67%), golongan II sebanyak 2 pegawai (26,47%), golongan IX sebanyak 1 pegawai (0,98%) dan golongan VII sebanyak 1 pegawai (0,98%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1.	**Golongan IV**	**6**	**9,83**
	IV/b	1	1,63
	IV/a	5	8,19
2.	**Golongan III**	**36**	**59,01**
	III/d	12	19,67
	III/c	17	27,86
	III/b	5	8,19
	III/a	2	1,18
3.	**Golongan II**	**17**	**27,86**
	II/d	14	22,95
	II/c	3	4,91
4.	**Golongan IX**	**1**	**1,63**
	IX	1	1,63
5.	**Golongan VII**	**1**	**1,63**
	VII	1	1,63
JUMLAH		**61**	**100,00**

Sumber: Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, per Desember 2024

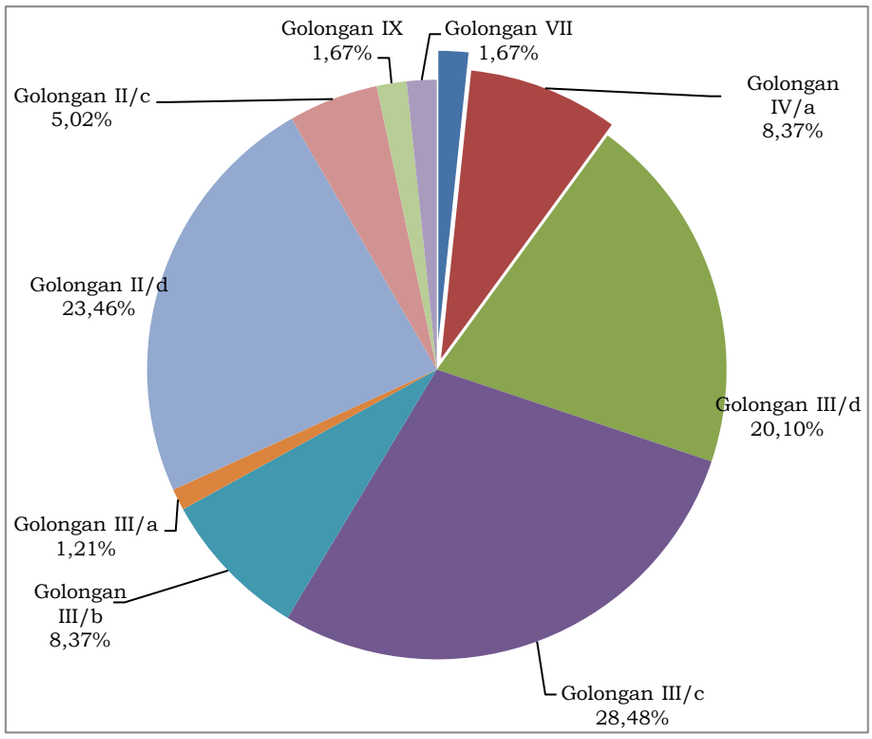

Sumber: Kecamatan Gayamsari Kota Semarang,per Desember 2024

Gambar 2.3
Komposisi ASN Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Tahun 2024 Berdasarkan Golongan / Ruang

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN Kelurahan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan Golongan / Ruang, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.4

Jumlah ASN per unit pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Kecamatan/Kelurahan	IV	III	II	I	VII	IX	JUMLAH
1	Kecamatan	2	12	8	-	1	1	19
2	Tambakrejo	-	5	1	-	-	-	6
3	Kaligawe	2	3	1	-	-	-	6
4	Sawah Besar	-	3	2	-	-	-	6
5	Siwalan	-	3	1	-	-	-	4
6	Sambirejo	1	3	1	-	-	-	5
7	Pandean Lamper	1	4	1	-	-	-	6
8	Gayamsari	-	3	2	-	-	-	5
	Jumlah	**6**	**36**	**17**	**-**	**1**	**1**	**61**

Sumber: Kecamatan Gayamsari Kota Semarang,per Desember 2024

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 61 ASN terdapat 2 pegawai (3,27%) yang menduduki eselon III, 40 pegawai (65,57%) yang menduduki eselon IV, 2 pegawai (3,27%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 17 pegawai (27,86%) yang termasuk dalam jabatan pelaksana, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.5
Jumlah ASN Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1.	Eselon III	2	3,27
2.	Eselon IV	40	65,57
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	2	3,27
4.	Jabatan Pelaksana	17	27,86
JUMLAH		**61**	**100,00**

Sumber: Kecamatan Gayamsari Kota Semarang,per Desember 2024

Adapun rincian jumlah dan komposisi ASN Kelurahan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah ASN Kelurahan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024
Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana

No	Kecamatan/Kelurahan	III	IV	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	JUMLAH
1	Kecamatan	2	12	2	8	24
2	Tambakrejo	-	5	-	1	6
3	Kaligawe	-	3	-	1	4
4	Sawah Besar	-	3	-	2	5
5	Siwalan	-	3	-	1	4
6	Sambirejo	-	3	-	1	4
7	Pandean Lamper	-	4	-	1	5
8	Gayamsari	-	3	-	2	5
	Jumlah	**2**	**40**	**2**	**17**	**61**

Sumber: Kecamatan Gayamsari Kota Semarang,per Desember 2024

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Gayamsari berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Aset Tanah Kecamatan Gayamsari

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	157,75	2005	Jl. Purwosari RT 07 RW III	Hak Pakai		HP 31	Rumah Dinas Lurah Tambakrejo	Pembelian	43.000.000	
2.	Tanah Kaveling (dst)	282	1987	Kp. Tenggang RT 06 RW VII	Hak Pakai	30/04/2007	HP 98	Balai Kelurahan Tambakrejo	Pembelian	23.124.000	
3.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	180	1982	Jl. Purwosari IV / 12 RT 05 RW III	Hak Pakai	30/04/2007	HP 97	Kantor Kelurahan Tambakrejo	Pembelian	14.760.000	
4.	Tanah Tambak / Empang / Kolam Ikan / Akuarium	12.266	1987	Kp. Gembongsari Dalam RW VII	Hak Pakai	30/04/2007	HP 94	Tambak / Pertanian	Pembelian	1.005.812.000	
5.	Tanah Untuk Makam Umum	9.447	1987	Kp. Gembongsari Dalam RW VII	Hak Pakai	30/04/2007	HP 99	Makam Umum / Kuburan Umum	Pembelian	774.654.000	
6.	Tanah Kaveling (dst)	26.240	2005	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI	Hak Pakai			Tanah Rusunawa	Pembelian	325.000	
7.	Tanah Kaveling (dst)	10.825	2015	Jl. Sawah Besar XIII RT 01 – 08 RW IX	Hak Pakai			Tanah Rusunawa	Pembelian	3.085.125.000	
8.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	918	2010	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI	Hak Pakai	23/08/2007	HP 2	Kantor Kelurahan dan Rumah Dinas Lama	Pembelian	196.300.000	
9.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.161	1980	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI	Hak Pakai			Tanah Rusunawa	Pembelian	1.112.500	
10.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	16.815	1984	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI	Hak Pakai			Tanah Rusunawa	Pembelian	950.000	
11.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7.898	1984	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI	Hak Pakai			Tanah Rusunawa	Pembelian	131.250	
12.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.615	1993	Jl. Dempel Barat RT 04 RW VIII	Hak Pakai	30/04/2007	HP 5	Tanah Bangunan Balai dan Rumah Dinas	Pembelian	412.500.000	
13.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	224	2009	Jl. Tambak Dalam RT 03 RW III	Hak Pakai	25/06/1996	HP 228	Kantor Kelurahan Sawah Besar	Pembelian	18.500.000	
14.	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	20.975	2010	Jl. Dempel Barat RT 01, 02 RW X	Hak Pakai	04/07/2007	HP 6	Tanah Rusunawa	Pembelian	3.217.000.000	
15.	Tanah Tambak / Empang / Kolam Ikan / Akuarium	27.385	2010	Jl. Dempel Barat RT 04 RW VIII	Hak Pakai	17/04/1993	Proses Sertifikat	Tambak / Empang / Polder	Pembelian	151.000.000	
16.	Tanah Untuk Makam Umum	5.385	1993	Jl. Dempel Barat RT 04 RW VIII	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Makam Umum	Pembelian	615.000.000	
17.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.508	1993	Jl. Plewan II RT 09 RW III No. 30	Hak Pakai	14/12/2007	HP 2	Kantor Kelurahan Siwalan	Pembelian	300.000.000	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
18.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.846	1984	Jl. Medoho Raya RT 04 RW VII	Hak Pakai	30/04/2007	HP 5	Kantor Kelurahan Sambirejo	Pembelian	784.000.000	
19.	Tanah Untuk Bangunan Masjid	2.199	2001	Jl. Medoho Raya RT 04 RW VII	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Masjid, Gedung TK Al Ikhlas, TPQ	Pembelian	250.000.000	
20.	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	250	1985	Jl. Medoho Raya No. 46 RT 06 RW VI	Hak Pakai			Tanah untuk Bangunan Gereja	Pembelian	116.000.000	
21.	Tanah Lapangan Bola Volly	3.080	2010	Jl. Sidorejo I RT 01 RW VII	Hak Pakai			Gudang Disperkim, Posyandu, Masjid	Pembelian	929.200.000	
22.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.165	2010	Jl. Padepokan Ganesha Raya No. 1 RT 11 RW IX	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Kantor Kelurahan Pandean Lamper	Pembelian	3.427.100.000	
23.	Tanah Untuk Bangunan Masjid	757	2010	Jl. Banteng Utara VI RT 06 RW V	Hak Pakai	22/11/2005	HP 8	Masjid Al Muhtadun dan Balai RW	Pembelian	385.200.000	
24.	Tanah Untuk Bangunan Masjid	2.060	2010	Jl. Bintoro II No. 54 RT 08 RW VII	Hak Pakai	04/07/2007	HP 15	Masjid Miftahul Jannah	Pembelian	857.900.000	
25.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	500	2015	Jl. Gajah Barat IV RT 03 RW IX	Hak Pakai			Tanah Kosong	Pembelian	974.400.000	
26.	Tanah Lapangan Sepak Bola	11.220	2001	Jl. Unta Raya RT 02 RW XI	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Lapangan Citra Satwa	Pembelian	500.000	
27.	Tanah Lapangan Bola Volly	280	2001	Jl. Banteng I RT 04 RW IV	Hak Pakai	30/04/2007	HP 13	Tanah Kosong	Pembelian	500.000	
28.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.530	1983	Jl. Slamet Riyadi No. 4 RT 04 RW V	Hak Pakai	27/11/2015	HP 18	Komplek Kelurahan Gayamsari	Pembelian	882.500.000	
29.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.788	1983	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW VI	Hak Pakai	27/11/2015	HP 20	Kantor Kecamatan Gayamsari	Pembelian	937.000.000	
30.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.800	1984	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW VI	Hak Pakai			Polsek dan Asrama Polisi Gayamsari	Pembelian	450.000	
31.	Tanah Lapangan Tenis	5.252	1984	Jl. Kanguru Raya RT 01 RW I	Hak Pakai		Proses Sertifikat	Sarana Olahraga dan Taman Bermain	Pembelian	1.163.000.000	

Tabel 2.8
Gedung dan Bangunan Kecamatan Gayamsari

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	450	Jl. Medoho Raya RT 04 RW VII Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari	450	Tanah Milik Pemda	Pembelian	199,156,328.00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	180	Jl. Purwosari IV / 12 RT 05 RW III Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari	180	Tanah Milik Pemda	Pembelian	796,303,569.00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	207	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari	207	Tanah Milik Pemda	Pembelian	934,091,589.00
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	500	Jl. Medoho Raya No. 21	500	Tanah Milik Pemda	Pembelian	670,347,332.00
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	184	Jl. Padepokan Genesha Raya No. 1 RT 11 RW IX Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari	184	Tanah Milik Pemda	Pembelian	96,686,001.00
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	216	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari	216	Tanah Milik Pemda	Pembelian	325,457,561.00
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	180	Jl. Tambak Dalam RT 03 RW III No. 84 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari	180	Tanah Milik Pemda	Pembelian	863,165,937.00
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	413	Jl. Plewan II RT 09 RW III No.30 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari	413	Tanah Milik Pemda	Pembelian	401,484,896.00
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	200	Jl. Slamet Riyadi No. 4 RT 04 RW V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	200	Tanah Milik Pemda	Pembelian	273,583,158.00
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	216	Jl. Dempel Barat RT 04 RW VIII Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari	216	Tanah Milik Pemda	Pembelian	772,461,285.00
11	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	B	20	Jl. Patiunus III RT 02 RW XI Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	82,638,147.00
12	Lain-lain	B	201	Jl. Purwosari IV / 12 RT 05 RW III Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari	201	Tanah Milik Pemda	Pembelian	112,710,591.00
13	Lain-lain	B	20	Jl. Tambakboyo RT 14 RW 02 Kelurahan Siwalan Kec. Gayamsari	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	46,195,769.00
14	Lain-lain	B	20	Jl. Pandansari I RT 06 RW 02 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	65,662,100.00
15	Lain-lain	B	20	Jl. Sidorejo I RT 01 RW VII Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	43,565,608.00
16	Lain-lain	B	450	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari	450	Tanah Milik Pemda	Pembelian	174,549,427.00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
17	Banguan Tempat Ibadah Permanen	B	450	Jl. Medoho Raya RT 05 RW VII Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari	450	Tanah Milik Pemda	Pembelian	250,000,000.00
18	Banguan Tempat Ibadah Permanen	B	63	Jl. Slamet Riyadi No. 8 Semarang RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	63	Tanah Milik Pemda	Pembelian	71,500,000.00
19	Banguan Tempat Ibadah Permanen	B	65	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	65	Tanah Milik Pemda	Pembelian	24,500,000.00
20	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	B	282	Kp. Tenggang RT 06 RW VII Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari	282	Tanah Milik Pemda	Pembelian	16,000,000.00
21	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	B	650	Jl. Slamet Riyadi No. 4 RT 04 RW V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	650	Tanah Milik Pemda	Pembelian	458,883,000.00
22	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	B	550	Jl. Plewan II RT 09 RW III No. 30 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari	550	Tanah Milik Pemda	Pembelian	475,208,000.00
23	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	B	498	Jl. Medoho Raya RT 04 RW VII Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari	498	Tanah Milik Pemda	Pembelian	356,373,645.00
24	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	B	600	Jl. Padepokan Ganesa Raya No. 1 RT 11 RW IX Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari	600	Tanah Milik Pemda	Pembelian	283,628,000.00
25	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	B	498	Jl. Medoho Raya RT 03 RW VII Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari	498	Tanah Milik Pemda	Pembelian	249,000,000.00
26	Bangunan gedung Pertemuan Permanen	B	180	Jl. Kimar III RT 02 RW IV Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari	180	Tanah Milik Pemda	Pembelian	189,220,000.00
27	Gedung Pendidikan Permanen	B	49	Jl. Slamet Riyadi No. 4 RT 04 RW V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	49	Tanah Milik Pemda	Pembelian	87,000,000.00
28	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	B	1213	Jl. Kanguru Raya RT 01 RW I Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	1213	Tanah Milik Pemda	Pembelian	204,950,000.00
29	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	B	397	Jl. Unta Raya RT 02 RW XI Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari	397	Tanah Milik Pemda	Pembelian	86,700,810.00
30	Lain-lain	B	3080	Jl. Sidorejo I RT 01 RW VII Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari	3080	Tanah Milik Pemda	Pembelian	180,000,000.00
31	Bangunan Lapangan sepak bola	B	768	Jl. Kanguru Raya RT 01 RW I Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	768	Tanah Milik Pemda	Pembelian	743,791,865.00
32	Lain-lain	B	9	Jl. Tambakboyo RT 14 RW 02 Kelurahan Siwalan Kec. Gayamsari	9	Tanah Milik Pemda	Pembelian	33,127,700.00
33	Lain-lain	B	9	Jl. Sawah Besar X RW 06 Kelurahan Kaligawe	9	Tanah Milik Pemda	Pembelian	28,705,282.00
34	Lain-lain	B	9	Jl. Gajah Barat IV RT 03 RW 09 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari	9	Tanah Milik Pemda	Pembelian	37,905,457.00
35	Lain-lain	B	20	Jl. Sidorejo I RT 01 RW 07 Kelurahan Sambirejo Kec. Gayamsari	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	24,803,100.00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
36	Lain-lain	B	9	Jl. Tambakboyo RT 08 RW II Kel. Siwalan Kec. Gayamsari	9	Tanah Milik Pemda	Pembelian	24,825.50
37	Lain-lain	B	9	Jl. Tambakboyo RT 14 RW II Kel. Siwalan Kec. Gayamsari	9	Tanah Milik Pemda	Pembelian	24,825,500.00
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	585	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	585	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3,735,259,900.00
39	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	118	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	118	Tanah Milik Pemda	Pembelian	40,000,000.00
40	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	131	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	131	Tanah Milik Pemda	Pembelian	585,918,659.00
41	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	250	Jl. Slamet Riyadi No. 4 RT 04 RW V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	250	Tanah Milik Pemda	Pembelian	120,501,000.00
42	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	12	Jl. Slamet Riyadi No. 4 RT 04 RW V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	12	Tanah Milik Pemda	Pembelian	34,229,000.00
43	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	36	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari	36	Tanah Milik Pemda	Pembelian	300,000,000.00
44	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	3080	Jl. Sidorejo I RT 01 RW VII Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari	3080	Tanah Milik Pemda	Pembelian	600,923,649.00
45	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	42	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	42	Tanah Milik Pemda	Pembelian	48,000,000.00
46	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	392	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	392	Tanah Milik Pemda	Pembelian	9,500,000.00
47	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	500	Jl. Sawah Besar XIII RT 05 RW VI Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari	500	Tanah Milik Pemda	Pembelian	92,738,000.00
48	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	11	Jl. Slamet Riyadi No. 8 Semarang RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	11	Tanah Milik Pemda	Pembelian	45,000,000.00
49	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	B	24	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	24	Tanah Milik Pemda	Pembelian	96,000,000.00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
50	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	B	204	Jl. Slamet Riyadi No. 8 RT 01 RW IV Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	204	Tanah Milik Pemda	Pembelian	461,198,069.00
51	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	B	150	Jl. Dempel Barat RT 04 RW VIII Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari	150	Tanah Milik Pemda	Pembelian	89,920,000.00
52	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	B	168	Jl. Slamet Riyadi No. 4 RT 04 RW V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari	168	Tanah Milik Pemda	Pembelian	60,000,000.00
53	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	B	150	Jl. Plewan II RT 09 RW III No. 30 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari	150	Tanah Milik Pemda	Pembelian	75,000,000.00
54	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	B	72	Jl. Medoho Raya RT 04 RW VII Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari	72	Tanah Milik Pemda	Pembelian	235,156,328.00
55	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	B	155	Jl. Purwosari VI RT 07 RW III Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari	155	Tanah Milik Pemda	Pembelian	144,017,124.00
56	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	B	120	Jl. Padepokan Ganesha Raya No. 1 RT 11 RW IX Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari	120	Tanah Milik Pemda	Pembelian	39,200,000.00
57	Flat/Rumah Susun Permanen	B	699	Jl. Tambakan RT 05 RW VII Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari	699	Tanah Milik Pemda	Pembelian	30,045,400,000.00
58	Lain-lain	B	10	Jl. Slamet Riyadi No. 4 Semarang	10	Tanah Milik Pemda	Pembelian	5,000,000.00

2.1.3. *Kinerja Pelayanan Kecamatan Gayamsari*

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Gayamsari.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Gayamsari

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Gayamsari berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Kewilayahan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Semarang Tahun 2021 – 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Tujuan :																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	85,00	88,00	93,00	94,00	95,00	85,00	88,00	92,30	94,92	99,55	100%	100%	99,24 %	100,97 %	104,78 %
	Indikator Sasaran :																		
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	-	-	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	1	-	-	N/A	N/A	100%	-	-
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	-	-	N/A	90	100	100	100	N/A	90	100	100	100	N/A	100%	100%	100%	100%
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	-	-	95	97	98	100	100	95	97	98	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	-	N/A	40%	45%	-	-	N/A	40%	45%	-	-	N/A	100%	100%	-	-
	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	-	-	81,68	83,36	85,04	86,72	-	81,68	83,36	85,04	86,72	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	-	-	-	87	90	92	95	-	87	90	92	95	-	100%	100%	100%	100%
	Indikator Program :																		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persen	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	Persen	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	Persen	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan RT	Persen	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Aset	-	-	13 Aset	16 Aset	-	-	-	13 Aset	15 Aset	-	-	-	100%	93,75%	-	-	-
	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	Kelurahan	-	-	7 Kelurahan	7 Kelurahan	-	-	-	7 Kelurahan	7 Kelurahan	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan Kelurahan)	Kegiatan	-	-	717 Kegiatan	768 Kegiatan	-	-	-	717 Kegiatan	768 Kegiatan	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	Persen	-	-	53%	55%	-	-	-	53%	55%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	Persen	-	-	98%	99%	-	-	-	98%	99%	-	-	-	100%	100%	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	Persen	-	-	93%	95%	-	-	-	93%	95%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar PATEN	Persen	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	Pelayanan	-	-	12.000	12.000	-	-	-	12.000	12.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	Kelurahan	-	-	7	7	-	-	-	7	7	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan	Persen	-	-	83	85	-	-	-	94	97,71	-	-	-	113,25 %	114,95 %	-	-	-
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persen	-	-	-	85	91	92	93	-	85	91	92	93	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	-	-	-	95	97	98	99	-	95	97	98	99	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	-	-	0	10	15	20	-	0	10	15	20	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	-	-	-	85	90	92	95	-	85	90	92	95	-	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	Indikator Lainnya																		
	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	-	-	N/A	95	-	-	-	-	95	-	-	-	N/A	100%	-	-	-
	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persen	-	-	-	-	11,14	10,52	9,9	-	-	11,14	10,52	9,9	-	-	100%	100%	100%
	Nilai AKIP	Angka	-	-	75,00	75,50	76,00	76,50	76,50	64,04	64,04	71,01	74,47	75,41	85,38%	84,82%	93,43 %	92,82	98,57%

Sumber Data : Kecamatan Gayamsari Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.10
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00	92,00	93,00	94,00	99,91

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

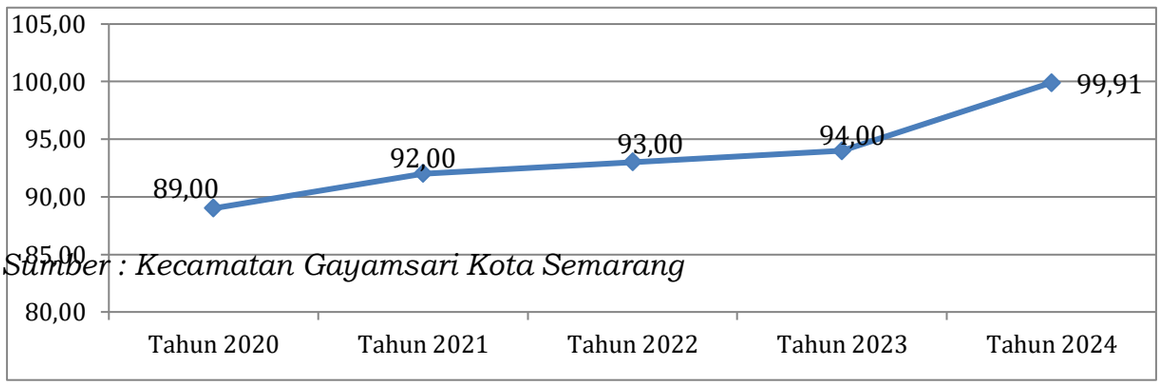

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Gambar 2.5
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

Selain dari Indeks Kepuasan Masyarakat, kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari juga dilihat dari Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.11
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

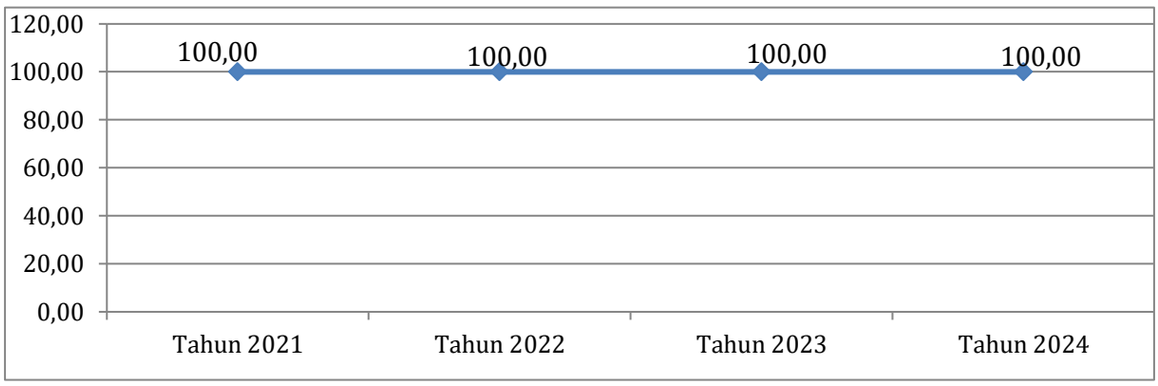

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Gambar 2.6
Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020-2024

Sedangkan untuk Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.12
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

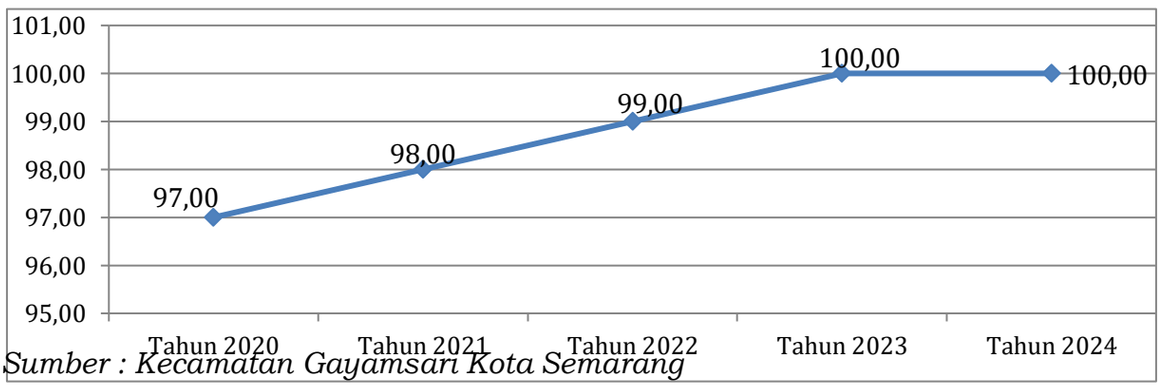

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Gambar 2.7
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

Kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.13
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum	-	81,68%	83,36%	97,48%	99,64%

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

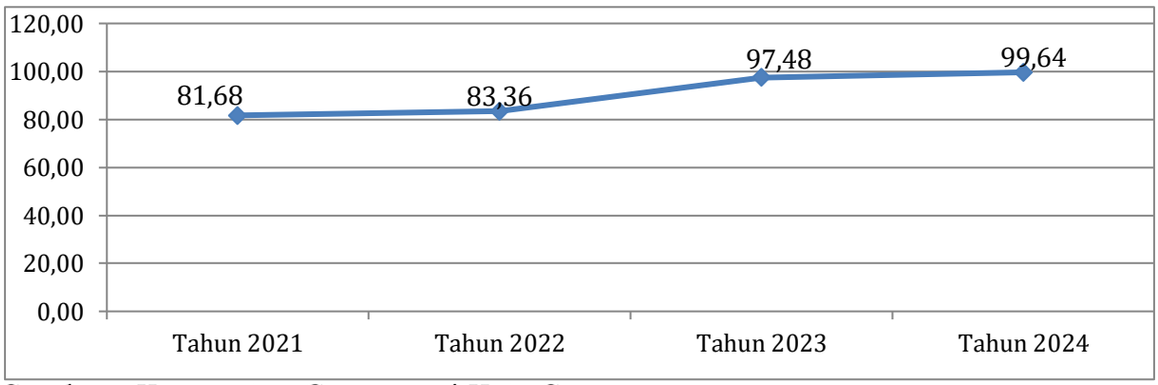

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Gambar 2.8
Persentase Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

Sedangkan untuk Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan, dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.13
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	-	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

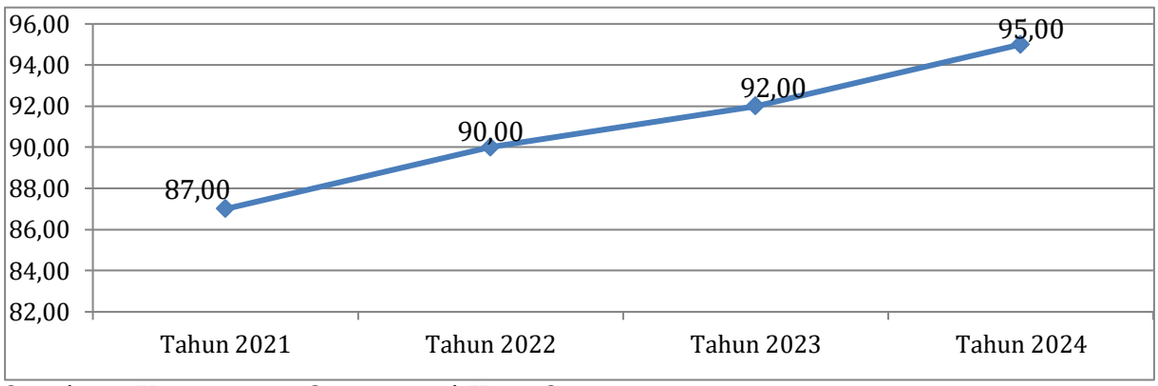

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Gambar 2.9
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Tahun 2020 – 2024

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Gayamsari

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Gayamasri. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Gayamsari. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Gayamsari.

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Uraian	*Anggaran pada Tahun ke-*					*Realisasi Anggaran pada Tahun ke-*					*Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-*					*Rata-rata Pertumbuhan*	
	I	*II*	*III*	*IV*	*V*	*I*	*II*	*III*	*IV*	*V*	*I*	*II*	*III*	*IV*	*V*	*Anggaran*	*Realisasi*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
JUMLAH BELANJA	**16.303.650.000**	**30.403.539.908**	**28.239.049.648**	**33.150.785.476**	**33.705.292.065**	**16.216.722.924**	**28.704.664.759**	**27.482.311.829**	**32.442.753.510**	**32.602.244.395**	**99,47**	**94,41**	**97,32**	**97,86**	**96,73**	**24,62**	**22,80**
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	287.420.000	0	0	0	0	286.396.300	0	0	0	0	99,64	0	0	0	0	0	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	192.540.000	0	0	0	0	192.540.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	6.908.916.000	0	0	0	0	6.870.882.000	0	0	0	0	99,45	0	0	0	0	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.787.374.000	0	0	0	0	7.741.444.000	0	0	0	0	99,41	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	429.770.000	0	0	0	0	428.280.074	0	0	0	0	99,65	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	259.035.000	0	0	0	0	258.585.550	0	0	0	0	99,83	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	430.595.000	0	0	0	0	430.595.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Intensifikasi PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	11.517.871.504	11.201.560.375	12.353.167.143	12.465.383.521	0	10.693.581.665	10.700.204.293	11.833.549.100	11.898.956.890	0	92,84	97,80	95,79	95,46	2,81	3,73

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	7.832.182.775	2.162.166.569	2.154.067.375	2.368.755.506	0	7.202.972.716	2.065.121.936	2.096.945.953	2.316.097.275	0	91,96	95,51	97,34	97,78	-20,94	-19,77
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	10.797.215.575	14.835.128.304	18.541.296.318	18.776.603.038	0	10.558.468.378	14.678.303.500	18.505.311.457	18.294.340.230	0	97,78	98,94	99,81	97,43	21,21	21,32
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	256.269.055	20.194.400	25.504.640	20.750.000	0	249.642.000	19.215.000	25.090.000	19.900.000	0	97,41	95,15	98,37	95,90	-28,18	-27,49
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	20.000.000	76.750.000	73.800.000	0	0	19.467.000	76.750.000	72.950.000	0	0	97,33	100,00	98,85	139,95	144,66

Sumber data : Kecamatan Gayamsari

c. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Gayamsari bekerja sama dengan berbagai mitra strategis yang mencakup unsur pemerintah, instansi vertikal, lembaga kesehatan, organisasi sosial, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat. Dari sisi internal, kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Gayamsari menjadi ujung tombak pelayanan administrasi, dibantu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang, seperti UPT Disdukcapil untuk pengurusan dokumen kependudukan.

Pada lingkup instansi vertikal, kemitraan dijalin dengan Polsek Gayamsari dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Koramil untuk dukungan keamanan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pelayanan pencatatan nikah dan urusan keagamaan Islam.

Pelayanan di bidang kesehatan didukung oleh Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan dasar, serta rumah sakit dan klinik sebagai fasilitas rujukan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan turut menjadi mitra dalam pengelolaan jaminan sosial bagi masyarakat maupun aparatur.

Di bidang sosial dan pemberdayaan, Kecamatan Gayamsari bermitra dengan PKK dan Posyandu untuk pelayanan kesehatan ibu-anak serta pemberdayaan keluarga, Karang Taruna untuk kegiatan kepemudaan dan sosial, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai wadah partisipasi warga.

Kemitraan juga terjalin dengan pelaku UMKM, koperasi, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Selain itu, komunitas dan LSM berperan dalam pendampingan masyarakat di bidang lingkungan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memperkuat kualitas pelayanan yang diberikan di Kecamatan Gayamsari.

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja PD

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) berperan sebagai mitra strategis Kecamatan Gayamsari dalam mendukung pencapaian kinerja, khususnya pada aspek penyediaan layanan publik, peningkatan ekonomi daerah, dan penguatan infrastruktur pendukung. Melalui produk dan layanannya, BUMD membantu kecamatan memperlancar tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pencapaian target pembangunan daerah.

Misalnya, **PDAM Tirta Moedal** berkontribusi melalui penyediaan dan pemerataan layanan air bersih bagi warga, sehingga mendukung indikator pelayanan dasar di bidang kesehatan dan lingkungan. **Bank Jateng** memfasilitasi transaksi keuangan, pengelolaan kas daerah, hingga program kredit mikro yang bermanfaat bagi pelaku UMKM di wilayah Gayamsari. Selain itu, **BUMD pengelola pasar** seperti PD Pasar Jaya (jika di Semarang menggunakan badan pengelola pasar daerah) membantu optimalisasi pengelolaan pasar tradisional, menjaga ketersediaan bahan pokok, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Dukungan ini tidak hanya bersifat layanan langsung, tetapi juga melalui program tanggung jawab sosial (CSR) BUMD yang dapat diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas umum, dan penanggulangan masalah sosial. Sinergi antara Kecamatan Gayamsari dan BUMD tersebut berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pencapaian target kinerja kecamatan, dan mendukung

terwujudnya visi pembangunan Kota Semarang yang inklusif dan berkelanjutan.

e. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Kecamatan Gayamsari menjadi bagian dari pelaksanaan berbagai kerja sama antar daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang, baik dalam bidang pelayanan publik, ekonomi, infrastruktur, maupun penanggulangan bencana. Dalam aspek pelayanan publik, kerja sama diwujudkan melalui integrasi layanan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini memudahkan masyarakat Gayamsari untuk mengurus dokumen kependudukan seperti e-KTP, akta kelahiran, dan perpindahan penduduk, meskipun berasal dari atau pindah ke daerah lain. Selain itu, kerja sama jaringan pelayanan kesehatan rujukan memungkinkan warga mendapatkan layanan medis lanjutan di rumah sakit daerah di luar Kota Semarang.

Pada sektor ekonomi, Kecamatan Gayamsari memperoleh manfaat dari kerja sama distribusi barang dan jasa dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal, yang memasok kebutuhan pangan dan hasil pertanian ke pasar-pasar lokal. Kemitraan antar daerah juga terjalin melalui program pengembangan UMKM, di mana pelaku usaha Gayamsari ikut serta dalam pameran, pelatihan, dan promosi bersama yang digelar di wilayah metropolitan Kedungsepur.

Di bidang infrastruktur dan transportasi, kerja sama diwujudkan dalam integrasi transportasi publik lintas daerah serta koordinasi pengelolaan sistem drainase dan penanggulangan banjir, khususnya dengan Kabupaten Demak. Sedangkan dalam penanggulangan bencana dan ketertiban, Kecamatan Gayamsari berperan dalam koordinasi lintas wilayah untuk evakuasi, penyaluran bantuan, pemulihan pasca bencana, dan operasi gabungan keamanan bersama aparat dari wilayah tetangga.

Melalui keterlibatan dalam kerja sama antar daerah ini, Kecamatan Gayamsari mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

f. Inovasi Perangkat Daerah

- **Sigap Mas Camat**

Kecamatan Gayamsari memiliki inovasi pelayanan publik bernama **"Sigap Mas Camat"**, yang dirancang sebagai sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan camat. Melalui inovasi ini, warga dapat menyampaikan laporan, keluhan, saran, maupun informasi terkait permasalahan di lingkungan mereka secara cepat, mudah, dan akurat.

Layanan **"Sigap Mas Camat"** memanfaatkan media komunikasi yang familiar bagi masyarakat, seperti aplikasi pesan instan dan kanal digital resmi kecamatan, sehingga laporan dapat diterima kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Setiap laporan yang masuk akan dicatat, diverifikasi, dan segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan dengan berkoordinasi bersama kelurahan atau instansi terkait.

Kehadiran inovasi ini mempercepat proses penyelesaian masalah di lapangan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan. Dengan **"Sigap Mas Camat"**, warga Gayamsari memiliki saluran efektif untuk menyampaikan aspirasi, dan pemerintah kecamatan memiliki alat yang

responsif untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berbasis data aktual.

- **Gadis Manis**

Kecamatan Gayamsari menghadirkan inovasi sosial bertajuk **"Gadis Manis"** atau **Keluarga Disabilitas Kecamatan Gayamsari Semarang**, yang menjadi wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, profesional, dan akuntabel. Program ini difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, dengan tujuan memastikan mereka memperoleh hak, kesempatan, dan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Melalui **"Gadis Manis"**, kecamatan membangun basis data keluarga penyandang disabilitas, memberikan pendampingan sosial, memfasilitasi akses layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi. Program ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari kelurahan, organisasi masyarakat, hingga mitra dunia usaha, untuk menciptakan ekosistem dukungan yang berkelanjutan.

Kehadiran inovasi **"Gadis Manis"** tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, tetapi juga mendorong terbangunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap inklusi sosial. Dengan demikian, Kecamatan Gayamsari dapat mewujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada keadilan bagi seluruh warga.

- **Jaga Sari**

Kecamatan Gayamsari mengembangkan inovasi lingkungan bernama **"Jaga Sari"** atau **Jaga Saluran Air Kecamatan Gayamsari**, yang difokuskan pada upaya menjaga kebersihan saluran air di wilayah kecamatan. Inovasi ini lahir dari kesadaran akan pentingnya pengelolaan saluran drainase untuk mencegah potensi banjir dan rob yang kerap terjadi di wilayah Gayamsari, terutama pada musim hujan atau saat pasang air laut.

Melalui **"Jaga Sari"**, pemerintah kecamatan bersama kelurahan, warga, dan mitra terkait secara rutin melakukan pembersihan saluran air, pengangkatan sedimentasi, serta penanganan sampah yang menyumbat aliran. Program ini juga dilengkapi dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuang limbah ke saluran air.

Kehadiran inovasi **"Jaga Sari"** telah meningkatkan efektivitas sistem drainase, meminimalkan risiko genangan, dan memperbaiki kualitas lingkungan permukiman. Selain itu, kolaborasi yang terjalin antara aparatur, warga, dan pihak ketiga dalam program ini menjadi wujud nyata partisipasi publik dalam menjaga lingkungan, sekaligus mendukung terwujudnya Kecamatan Gayamsari yang bersih, sehat, dan bebas banjir.

g. Penghargaan Perangkat Daerah

- Penghargaan Program Iklim Kelurahan Tambakrejo dengan Kategori Madya
- Penghargaan Program Iklim Kelurahan Pandean Lamper dengan Kategori Madya
- Juara III Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2023

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gayamsari dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Gayamsari sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Lingkungan Kecamatan Gayamsari yang merupakan wilayah banjir dan rob, dapat mengganggu baik stabilitas secara ekonomi maupun keamanan, hal ini menyebabkan perlunya perhatian khusus bagi seluruh saluran – saluran drainase yang ada di Wilayah Kecamatan Gayamsari.
2. Partisipasi Masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah agar dapat memberikan rasa kenyamanan dan keamanan sehingga tidak menimbulkan konflik – konflik sosial yang berkepanjangan.
3. Fasilitas Kantor Kecamatan Gayamsari yang belum memadai akibat keterlambatan proses Pembangunan Kantor Kecamatan Baru yang sudah diusulkan sejak tahun 2020 membuat aksesibilitas bagi kaum rentan baik disabilitas, ibu hamil, anak – anak dan lansia masih belum optimal.
4. Pengenalan sistem informasi pelayanan berbasis teknologi guna mendukung digitalisasi pelayanan publik yang disosialisasikan kepada Masyarakat masih belum dapat terealisasikan secara maksimal karena minimnya partisipasi Masyarakat dalam mendukung program tersebut.
5. Angka stunting yang masih tinggi di wilayah Kecamatan Gayamsari dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya asupan gizi pada ibu hamil dan anak – anak batita dan balita.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Gayamsari untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Melibatkan Masyarakat melalui program padat karya pembersihan saluran di wilayah Kecamatan Gayamsari sebagai bentuk kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Kota Semarang.
2. Memperkuat forum komunikasi warga seperti LPMK, PKK, FKK dan Karang Taruna juga berkoordinasi secara aktif dengan Polsek dan Koramil di Wilayah Kecamatan Gayamsari.
3. Pengajuan usulan Pembangunan Kantor Kecamatan Gayamsari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota.
4. Mengadakan pelatihan literasi digital di tiap kelurahan untuk meningkatkan keterampilan warga dalam pengoperasian aplikasi – aplikasi Pemerintah Kota Semarang.
5. Melakukan penyaluran bantuan dari Dinas Teknis untuk warga yang masuk dalam data stunting.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Gayamsari.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Gayamsari diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Gayamsari telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Gayamsari.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan

capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah **"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan"**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Kecamatan Gayamsari terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **"Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan"**, dengan 3 akar permasalahan yaitu Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan, dan Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah **"Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan"**.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020-2024) serta analisis permasalahan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Peran Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Gayamsari seperti LPMK, PKK, Karang Taruna dan RT/RW, sejatinya menjadi ujung tombak partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan wilayah. Namun, pada kenyataannya fungsi dan kinerja Lembaga – Lembaga ini belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan – kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah dilaksanakan, output dan sasaran kegiatan belum dapat diukur dampaknya di Masyarakat.

Beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar penentuan permasalahan **" Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif "** antara lain :

- Tingkat Partisipasi
  Jumlah kegiatan Lembaga yang melibatkan masyarakat masih sangat kurang.
- Dampak terhadap Masyarakat
  Tingkat kepuasan Masyarakat atas Lembaga kemasyarakatan belum dapat diukur karena masih minimnya survey kepuasan Masyarakat tentang hal tersebut.
- Kapasitas dan Kinerja Pengurus
  Masih rendahnya Tingkat keberhasilan program yang diusung oleh Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Gayamsari.

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya output dan sasaran dari kegiatan kelembagaan di wilayah Kecamatan Gayamsari.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN

Kecamatan Gayamsari merupakan unit terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menyentuh langsung kepentingan Masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan fasilitasi program Pembangunan kewilayahan. Namun, dalam praktiknya, kualitas pelayanan publik belum mencapai standar yang optimal dan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi Masyarakat.

Beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar penentuan permasalahan **" Belum Optimalnya Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN "** antara lain :

- Tidak Konsistennya Implementasi Pelayanan Ramah Disabilitas dan Lansia
  Aksesibilitas pelayanan bagi kelompok rentan masih belum sepenuhnya terakomodasi, baik secara fisik (fasilitas) maupun dalam hal pendekatan petugas pelayanan.
- Lamanya Waktu Penyelesaian Layanan
  Terdapat sejumlah pelayanan yang masih melebihi waktu standar pelayanan karena keterbatasan SDM dan implementasi sistem pelayanan yang baru.
- Kurangnya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang Diketahui Masyarakat
  Walaupun SPP sudah disusun, masih banyak warga yang tidak mengetahui hak dan prosedur pelayanan yang tersedia karena belum dapat disosialisasikan secara penuh kepada Masyarakat.

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik kepada Masyarakat.

c. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gayamsari masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah, parkir liar, pedagang kaki lima yang berjualan di luar zona yang ditentukan, serta gangguan keamanan lingkungan seperti pencurian dan konflik social skala kecil. Minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya personil keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan khususnya di Kelurahan juga menjadi salah satu factor sulitnya penyelesaian masalah tersebut.

Beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar penentuan permasalahan **" Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum "** antara lain :

- Sarana dan Prasarana Pendukung
  Rasio ketersediaan sarana patroli dan jumlah pos keamanan aktif di wilayah Kecamatan masih sangat minim.
- Partisipasi Masyarakat
  Jumlah warga yang berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masih sangat kurang.
- Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban
  Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban tidak terupdate secara maksimal karena kurangnya peran aktif dari stakeholder terkait.

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ketentramaan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Gayamsari;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Gayamsari;

c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gayamsari.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gayamsari;
b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gayamsari;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gayamsari;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gayamsari;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gayamsari;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Gayamsari;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gayamsari;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gayamsari;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gayamsari;
k. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gayamsari;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gayamsari.

Rumusan permasalahan utama Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.15
Rumusan Permasalahan
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Tahun 2025 - 2029

No	*Permasalahan*	*Akar Permasalahan*
1	belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Gayamsari	Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gayamsari
		Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gayamsari
		belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gayamsari
2	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Gayamsari	belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gayamsari
		belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
		belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gayamsari
3	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gayamsari	Belum optimalnya kualitas gagasan / ide Masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gayamsari
		Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari
		Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi Masyarakat Kecamatan Gayamsari

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan

dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif."

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.
Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Misi 1 **Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian**.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial, program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai

keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang. Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas.

Misi 2 Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang,
dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks. Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas.

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan

masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas.

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga
menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi

dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas.

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 37 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Gayamsari mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **"Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif"** dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **"Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas."**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu **"Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat**" (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan **"Indeks Reformasi Birokrasi"** (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Gayamsari mendukung pencapaian sasaran **"Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat"** (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran **"Indeks Pelayanan Publik"** (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran **"Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Semarang"** (Sasaran ke-19 RPJMD), dengan indikator sasaran **"Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan"** (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu **"Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah"** (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Gayamsari secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Kecamatan Gayamsari secara langsung berkontribusi membantu Wali Kota dalam mencapai indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, khususnya dalam:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, melalui penguatan peran Unit Pelayanan Terpadu (UPT) serta peningkatan responsivitas pelayanan administratif kepada warga;
2. Pemberdayaan ekonomi lokal, dengan mendorong pengembangan potensi wilayah seperti sentra industri kecil menengah, pertanian perkotaan, dan kawasan perdagangan;
3. Pelestarian lingkungan hidup, melalui kolaborasi program kampung iklim, penanganan sampah berbasis masyarakat, serta pengawasan pembangunan berbasis tata ruang;
4. Penguatan budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan pembangunan berbasis RW/Kelurahan yang sinergis dengan visi inklusifitas kota.
5. Kecamatan Gayamsari berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan diskriminasi, melainkan memberi manfaat yang adil bagi

perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, Anggaran Responsif Gender (ARG) diproyeksikan sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender sehingga alokasi sumber daya pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Implementasi ARG juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan tingkat kecamatan.

6. Sebagai bagian dari Kota Semarang, Kecamatan gayamsari mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui program dan kegiatan yang ramah terhadap pemenuhan hak anak. Upaya ini mencakup penyediaan ruang publik yang aman dan ramah anak, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak di lingkungan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, forum anak, dan kader PKK menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian indikator KLA.
7. Kecamatan gayamsari diarahkan sebagai Kecamatan Berdaya yang mampu memperkuat tata kelola pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada optimalisasi potensi lokal, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui penguatan kapasitas aparatur serta kolaborasi multipihak, kecamatan diharapkan menjadi simpul penggerak pembangunan partisipatif yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.
8. Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat terus diperkuat untuk memenuhi 6 layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan. Kecamatan Gayamsari berupaya mendukung revitalisasi Posyandu agar lebih terintegrasi, inovatif, dan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan berkesinambungan.
9. Kerukunan umat beragama merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif. Kecamatan Gayamsari memiliki keragaman agama dan keyakinan yang tinggi, sehingga diperlukan penguatan dialog antarumat beragama, fasilitasi kegiatan keagamaan, dan dukungan terhadap forum-forum kerukunan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Upaya ini diarahkan untuk mencegah potensi konflik sosial, memperkuat kohesi sosial, dan membangun budaya toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
10. Selain kerukunan umat beragama, harmonisasi wilayah menjadi isu strategis yang harus terus dijaga. Kecamatan Gayamsari sebagai kawasan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks menghadapi tantangan berupa potensi gesekan antarwarga, konflik kepentingan lahan, maupun perbedaan aspirasi pembangunan. Untuk itu, penguatan mekanisme mediasi, musyawarah, serta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan wilayah. Upaya harmonisasi ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Secara lengkap peranan Kecamatan Gayamsari dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

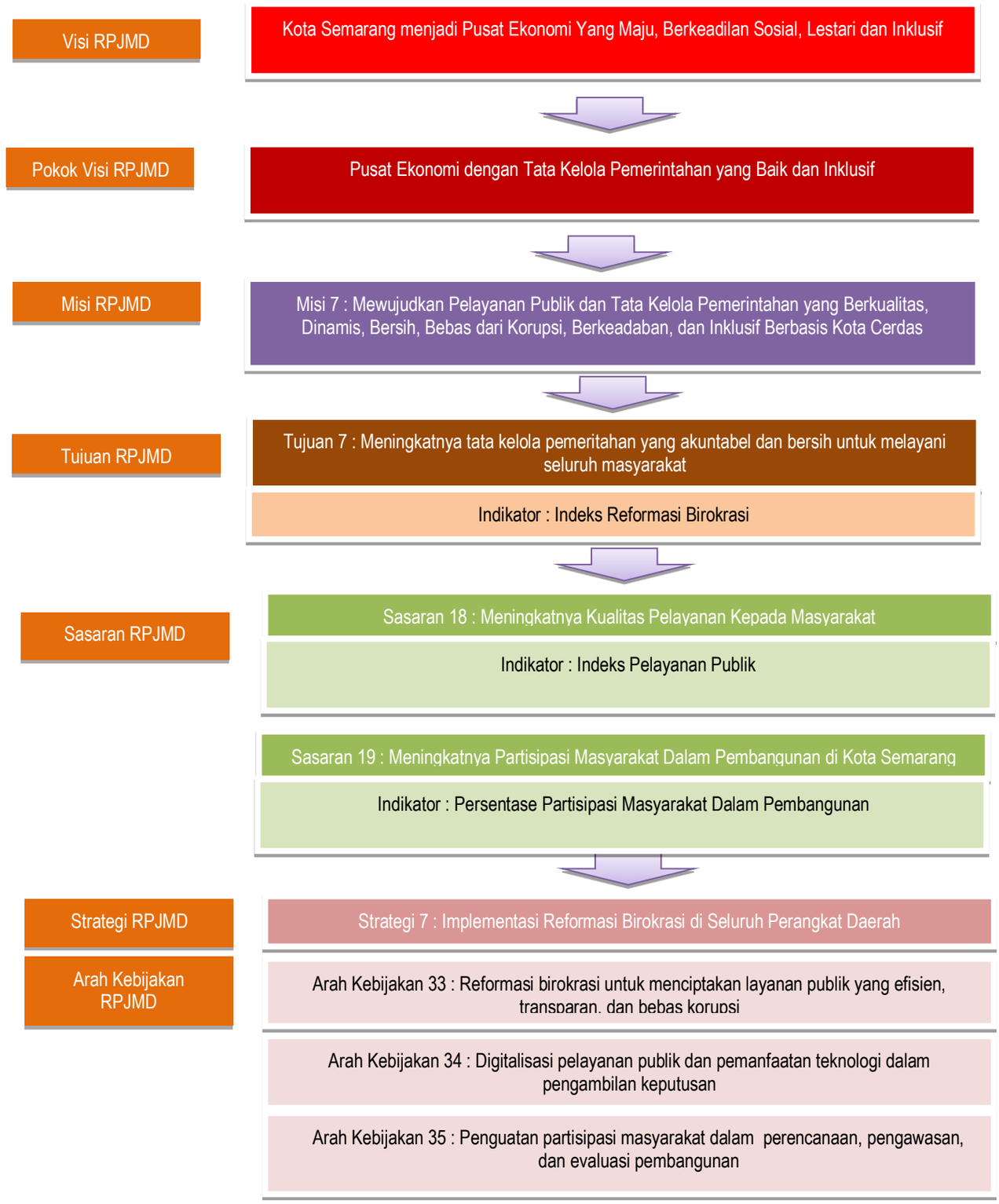

Gambar 2.10
Peranan
Kecamatan Gayamsari dalam Mendukung Pencapaian
Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

c. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Kecamatan Gayamsari tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk

mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, rencana struktur ruang meliputi:

1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)
   - Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
   - Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perkotaan Lainnya.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Gayamsari Adalah BWK V dengan luas kurang lebih 526,33 hektar, dengan rencana pengembangan fungsi utama sebagai Kawasan permukiman dan pusat kegiatan Masyarakat dengan penjabaran sebagai berikut :

1. **Kawasan Permukiman**
   - Merupakan fungsi dominan
   - Menyediakan harian untuk penduduk, termasuk perumahan menengah hingga bawah
   - Termasuk juga Kawasan permukiman lama, perumahan baru dan rusunawa

2. **Perdagangan dan Jasa**
   - Terdapat pasar tradisional, pusat perbelanjaan skala kecil hingga sedang
   - Banyak usaha kecil menengah (UMKM) dan toko – toko kelontong
3. **Fasilitas Pendidikan**
   - Mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA / SMK tersedia cukup lengkap
   - Beberapa perguruan tinggi atau kampus cabang juga ada di bagian ini
4. **Fasilitasi Rekreasi dan Olahraga**
   - Lapangan, taman warga, dan sarana olahraga umum
   - Kadang digunakan untuk kegiatan sosial dan budaya Tingkat kelurahan hingga kecamatan
5. **Transportasi dan Pergerakan**
   - Dilintasi jalan – jalan penting seperti Jalan Kaligawe (akses Pantura) dan dekat dengan Stasiun Tawang
   - Memiliki terminal dan akses ke jalur transportasi publik

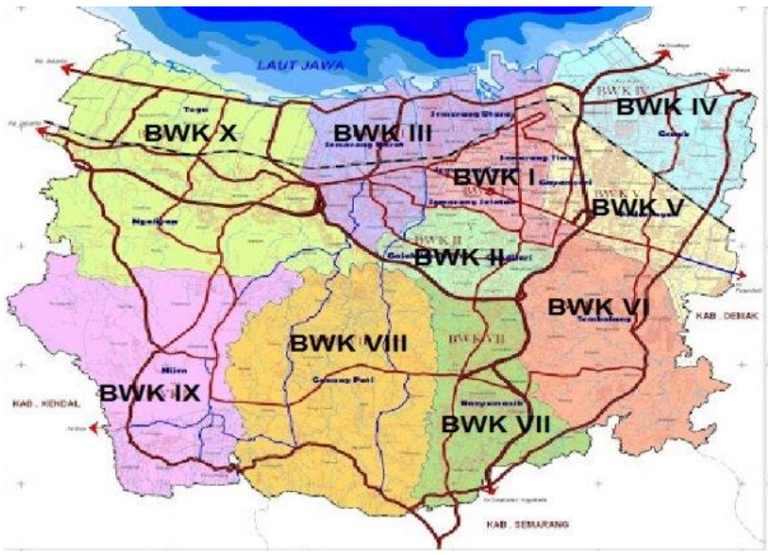

Gambar 2.11
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (RTRW) 2010 – 2030

Sedangkan penjabaran fungsi dan penerapannya di tiap kelurahan Adalah sebagai berikut :

1. **Kelurahan Gayamsari**
   - Permukiman campuran : hunian tapak dan ruko di sepanjang koridor jalan utama
   - Pusat kegiatan Masyarakat : pasar, sekolah, fasilitas kecamatan
2. **Kelurahan Pandean Lamper**
   - Permukiman dominan : perumahan padat dan kampung kota
   - Pusat kegiatan Masyarakat : fasilitas pendidikan, pusat Kesehatan, dan area komersial kecil
3. **Kelurahan Kaligawe**
   - Permukiman campur : mix hunian dan industry ringan
   - Pusat kegiatan Masyarakat : perdagangan grosir dan fasilitas di dekat akses transportasi utama dan stasiun
4. **Kelurahan Sambirejo**
   - Permukiman padat : hunian sederhana
   - Pusat kegiatan Masyarakat : pasar kelurahan, tempat ibadah, dan area jasa skala lokal
5. **Kelurahan Sawah Besar**
   - Permukiman dengan ruang terbuka : kepadatan sedang, lebih banyak lahan kosong
   - Pusat kegiatan Masyarakat : pasar tradisional dan fasilitas olahraga atau pendidikan
6. **Kelurahan Siwalan**
   - Permukiman dominan : jalan gang sempit dan hunian tapak
   - Pusat kegiatan Masyarakat : fasilitas pelayanan Masyarakat, masjid besar
7. **Kelurahan Tambakrejo**
   - Permukiman di zona rawan banjir : dekat Sungai atau saluran air
   - Pusat kegiatan Masyarakat : pasar kelurahan, area perdagangan kecil di koridor utama

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1)Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadapkeberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fokus dan perhatian pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup, masalah dan isu strategis KLHS Kota Semarang terbagi dalam 4 pilar, yaitu (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; (5) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari adalah isu pilar keempat yaitu "**Tata Kelola Kelembagaan**" dengan masalah strategis "**Belum optimalnya pelayanan public yang "transparan dan akuntabel**", dan isu strategis "**Perlunya memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab**", seperti dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.16
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Pilar	***Masalah Strategis***	***Isu Strategis***
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

Sumber : KLHS RPJMD Kota Semarang 2025 – 2029

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Gayamsari

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau

mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari adalah isu strategis ke tujuh, yaitu **"Penyelenggaraan Good Governance"**. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu : "standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang".

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gayamsari, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gayamsari, telaahan terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, telaahan terhadap RTRW, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Rumusan isu strategis pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Isu Strategis Kecamatan Gayamsari
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	***Permasalahan PD***	***Isu KLHS yang relevan***	***Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan***			***Isu Strategis Daerah***	***Isu Strategis***
			Global	***Nasional***	***Regional***		
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***
- Penilaian nilai SAKIP Kota Semarang - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gayamsari	Perlunya memperkuat kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab	- Perkembangan Teknologi - Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelenggaraan Good Governance	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Gayamsari
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Gayamsari	Perlunya memperkuat kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab	- Perkembangan Teknologi Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelenggaraan Good Governance	
- Pengembangan pembinaan program kampung iklim (proklim) di wilayah permukiman dan sekolah – sekolah Kota Semarang	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gayamsari	Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	Demografi Global	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Penurunan Angka Kemiskinan	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk peningkatan taraf hidup masyarakat	Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gayamsari
		Peningkatan ancaman	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Keberlanjutan Sumber	Peningkatan Daya Dukung	Peningkatan kesadaran

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	*Permasalahan PD*	*Isu KLHS yang relevan*	*Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan*			*Isu Strategis Daerah*	*Isu Strategis*
			Global	*Nasional*	*Regional*		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
- Adanya bantuan Raskin yang menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi warga miskin		risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim			Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana	dan Daya Tampung Kota	masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Gayamsari

Sumber : Kecamatan Gayamsari 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 VISI Kecamatan Gayamsari sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Gayamsari

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 yaitu **Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif**, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, agar dapat **terwujud Kota Semarang sebagai Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif**, dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :

“Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari”

. Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, yaitu :

1. **“Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Gayamsari”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).

2. **“Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari”**. Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu: Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

3. **Sasaran Renstra Kecamatan Gayamsari**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dimana Kecamatan Gayamsari mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Gayamsari.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Gayamsari maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari**
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gayamsari**.
      Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
   2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gayamsari**
      Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi. Pelaksanaan SKM diatur oleh Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, yang menjadi pedoman teknis bagi unit pelayanan publik dalam melakukan survei dan menyusun laporan IKM. Tujuan survei ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong inovasi, serta memacu transparansi dan akuntabilitas penyelenggara layanan. Nilai Indeks kepuasan Masyarakat dapat diperoleh pada aplikasi ASIKMAS yang dikelola oleh Bagian Organisasi SETDA Kota Semarang setiap triwulanan tahun berjalan.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gayamsari**
   Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gayamsari**".
   Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari sesuai dengan SOP Pelayanan yang ada, Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan**
   Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari**".
   Indikator ini diukur peningkatan fasilitasi anggaran kelembagaan agar dapat terlaksana dan tercapai berdasarkan output dan sasaran yang ditetapkan, maka untuk penyelanggaraan Lembaga kemasyarakatan dapat dilakukan penilaian kepuasan masyarakkat terhadap Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Gayamsari.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat											
	TUJUAN : **Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari**		**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gayamsari**	**Angka**	**N/A**	**95,00**	**95,50**	**96,00**	**96,50**	**97,00**	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gayamsari	Angka	76,50	76,51	76,52	76,53	76,54	76,55	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gayamsari	Angka	99,92	96	96,50	97	97,5	98	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gayamsari	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gayamsari	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari	**Angka**	**N/A**	**80,00**	**81,00**	**82,00**	**83,00**	**84,00**	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan											
		SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga	Angka	N/A	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari								

Sumber : Kecamatan Gayamsari Tahun 2025

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Gayamsari mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029

Strategi	***TAHAP I 2026***	***TAHAP II 2027***	***TAHAP III 2028***	***TAHAP IV 2029***	***TAHAP V 2030***
Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gayamsari	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gayamsari	√	√	√	√	√

Sumber : Kecamatan Gayamsari Tahun 2025

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gayamsari

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gayamsari;
(b) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gayamsari;
(c) peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gayamsari.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gayamsari;
(b) peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
(c) peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gayamsari;
(d) peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Gayamsari;
(e) peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gayamsari;
(f) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gayamsari.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gayamsari

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

(a) peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gayamsari;

(b) peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gayamsari;
(c) peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari;
(d) peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gayamsari.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gayamsari	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gayamsari	
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gayamsari	
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gayamsari	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gayamsari	
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Gayamsari	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gayamsari	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gayamsari	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gayamsari	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gayamsari	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gayamsari	

Sumber: Kecamatan Gayamsari 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Gayamsari	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gayamsari
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gayamsari
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gayamsari
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gayamsari	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gayamsari
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gayamsari
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Gayamsari
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gayamsari
			6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gayamsari

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gayamsari	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gayamsari
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gayamsari
			3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gayamsari

Sumber: Kecamatan Gayamsari 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan gayamsari tahun 2025-2029 , tentunya perlu dilakukan mitigasi risiko yang berdampak pada ketidaktercapaian tujuan dan sasaran yang sudah di tetapkan. Identifikasi risiko tersebut tertuang dalam dokumen Rencana strategis operasional (RSO) tahun 2025-2029 , dimana dalam dokumen tersebut sudah tertuang identifikasi risiko strategis dan rencana tindak pengendalian . Berikutr adalah identifikasi risiko strategis dan uraian pengendalian kelemahan pada lingkungan pengendalian :

Tabel 3.5
Daftar Risiko Prioritas Kecamatan Gayamsari

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Proses penyusunan dan penyajian informasi kinerja instansi kecamatan tidak tepat waktu	RSO.25.715.50.03	12	Camat Gayamsari	Keterlambatan dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan	Menghambat proses penyusunan laporan
				Camat Gayamsari	Petugas yang sama harus menangani berbagai tugas lain di luar penyusunan laporan, sehingga tidak bisa fokus dan menyelesaikan tugas ini tepat waktu	Laporan kinerja tertunda
				Camat Gayamsari	Dokumentasi yang masih kurang baik dalam mendukung pelaporan tepat waktu	Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam penyusunan AKIP
2	Penyalahgunaan asset untuk	RSO.25.715.50.04	12	Camat Gayamsari	Kurangnya pengawasan dan	Aset tidak mudah untuk

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	kepentingan pribadi				pengamanan aset yang ada	dikembalikan ke pemerintah
3	Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan dan waktu pelayanan	RSO.25.715.50.06	16	Camat Gayamsari	Kurangnya penyebaran informasi dan saluran informasi resmi yang mudah diakses oleh masyarakat	Meningkatnya keluhan publik, opini negatif di media sosial, dan bahkan protes.
4	Sarana dan prasarana penunjang tidak memberikan kenyamanan bagi masyarakat	RSO.25.715.50.09	16	Camat Gayamsari	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kurang memperhatikan kebutuhan riil dan preferensi masyarakat	Meningkatnya keluhan publik yang disampaikan melalui berbagai media
5	Kurangnya disiplin dan ketelitian kerja dalam penanganan bukti pelayanan	RSO.25.715.50.12	12	Camat Gayamsari	Ketidaksesuaian data dukung yang diupload petugas pelayanan dan sistem keamanan yang belum optimal	Proses verifikasi menjadi terhambat dan barcode lurah dan camat mudah untuk dipalsukan

Tabel 3.6
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/
RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	**Penegakan Integritas dan Nilai Etika**				
	Kecamatan Gayamsari belum melakukan update kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai dan belum dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	Penyusunan kode etik pegawai, pakta integritas, aturan perilaku pegawai kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Kecamatan Gayamsari	Camat Gayamsari	Triwulan III Tahun 2026	Maret 2026,2027,2028,2029
II	**Komitmen Terhadap Kompetensi**				
III	**Kepemimpinan yang kondusif**				
	Dokumen Rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan Gayamsari belum menyajikan informasi mengenai risiko	Memasukan informasi terkait risiko kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gayamsari	Camat Gayamsari	Triwulan I Tahun 2026	Jan-26
IV	**Struktur organisasi sesuai kebutuhan**				
	-				

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
V	**Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat**				
	-				
VI	**Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM**				
	-				
VII	**Perwujudan peran APIP yang efektif**				
	Saran/ rekomendasi dalam Laporan hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Gayamsari Tahun 2024 belum ditindaklanjuti	Menindaklanjuti LHE SAKIP Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan	Camat Gayamsari	Triwulan III Tahun 2025	September 2025, 2026, 2027,2028,2029
VIII	**Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait**				

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Gayamsari untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Gayamsari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari**				**Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gayamsari**		**Camat**
					Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari		**Camat**
		S1:Meningkatnya kualitas KINERJA pelayanan Kecamatan Gayamsari			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gayamsari (Angka)		**Camat**
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Angka)		**Camat**
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gayamsari yang berkualitas	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sekretaris Camat
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	7.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gayamsari beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	7.0.101.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	7.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.1.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gayamsari	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	7.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gayamsari	7..01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7..01.01.1.06 .0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7..01.01.1.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7..01.01.1.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7..01.01.1.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7..01.01.1.06 .0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.1.07 .0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gayamsari yang selesai ditindaklanjuti	7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.1.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.1.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gayamsari sesuai ketentuan	7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.1.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Operasional atau Lapangan			
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
		S2:Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan		Camat
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan gayamsari yang tepat waktu	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Perekonomian dan Kesejateraan Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Pemerintahan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Gayamsari	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayanan Publik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik Kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tambakrejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambakrejo	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Tambakrejo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Tambakrejo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kaligawe	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kaligawe	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Kaligawe

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Kaligawe
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sawah Besar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sawah Besar	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Sawah Besar
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Sawah Besar
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Siwalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Siwalan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Siwalan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Siwalan
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sambirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sambirejo	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Sambirejo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Sambirejo
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pandean Lamper	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pandean Lamper	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Pandean Lamper
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Pandean Lamper
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gayamsari	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Gayamsari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Kasie Pelayanan Publik/Staf Kelurahan Gayamsari
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kepala Seksi Pembangunan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Gayamsari	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staff Seksi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di Kecamatan Gayamsari			
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tambakrejo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tambakrejo	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Tambakrejo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kaligawe
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kaligawe	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Kaligawe
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Sawah Besar
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sawah Besar	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Sawah Besar

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Siwalan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Siwalan	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Siwalan
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Sambirejo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sambirejo	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Sambirejo
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pandean Lamper
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pandean Lamper	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Pandean Lamper
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Gayamsari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pelaksanaan tugas kewenangan camat			
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gayamsari	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Gayamsari
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gayamsari	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	7.01.04 .2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04 .2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gayamsari	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 .0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang		S3:Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 .0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Seksi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tambakrejo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakrejo	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Tambakrejo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kaligawe
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaligawe	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Kaligawe
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Sawah Besar
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawah Besar	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Sawah Besar
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Siwalan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegitan pemberdayaan			
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Siwalan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Siwalan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Sambirejo
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambirejo	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Sambirejo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Pandean Lamper
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean Lamper	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Pandean Lamper
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Gayamsari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gayamsari	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Gayamsari
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan Gayamsari	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tambakrejo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Tambakrejo	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Tambakrejo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kaligawe
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Kaligawe	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Kaligawe
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Sawah Besar
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sawah Besar	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Sawah Besar

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Siwalan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Siwalan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Siwalan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Sambirejo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sambirejo	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Sambirejo
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pandean Lamper
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pandean Lamper	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Pandean Lamper
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Gayamsari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Gayamsari	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Gayamsari
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Perangkat Daerah Kecamatan Gayamsari Mendukung pencapaian program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bnetuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	***Program Prioritas***	***Outcome***	***Kegiatan/Sub Kegiatan***	***Keterangan***
1.	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja kecamatan gayamsari	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling)	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5.	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

No	*Program Prioritas*	*Outcome*	*Kegiatan/Sub Kegiatan*	*Keterangan*
6.	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
7.	Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
8.	Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK			

Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Gayamsari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. Outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah. Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Kecamatan Gayamsari
Kota Semarang

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	*Indikator Outcome/Output*	*Baseline 2024*	*Target dan Pagu Indikatif Tahun n-*										*Keterangan*
			2026		*2027*		*2028*		*2029*		*2030*		
			Target	*Pagu*	*Target*	*Pagu*	*Target*	*Pagu*	*Target*	*Pagu*	*Target*	*Pagu*	
Urusan Kewilayahan													
7.01 - KECAMATAN				38.582.178.504		41.392.984.696		42.616.378.385		42.841.098.422		43.371.166.450	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.362.288.142		15.908.794.696		16.402.188.385		16.701.908.422		17.231.976.450	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gayamsari yang berkualitas (%)	100 %	100%	13.362.288.142	100%	15.908.794.696	100%	16.402.188.385	100%	16.701.908.422	100%	17.231.976.450	
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari (%)	100 %	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.636.000		5.188.000		5.188.000		5.188.000		5.188.000	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gayamsari beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100 %	5.636.000	100 %	5.188.000	100 %	5.188.000	100 %	5.188.000	100 %	5.188.000	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				448.000		448.000		448.000		448.000		448.000	Kecamatan Gayamsari
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	4 Dokumen	448.000	4 Dokumen	448.000	4 Dokumen	448.000	4 Dokumen	448.000	4 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan				448.000		448.000		448.000		448.000		448.000	Kecamatan Gayamsari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-									Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				448.000		448.000		448.000		448.000		448.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				448.000		448.000		448.000		448.000		448.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				448.000		448.000		448.000		448.000		448.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				448.000		448.000		448.000		448.000		448.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporam	5 Laporam	448.000	5 Laporam	448.000	5 Laporam	448.000	5 Laporam	448.000	5 Laporam	448.000	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.948.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Kecamatan Gayamsari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0 Dokumen	1 Dokumen	2.948.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.544.035.397		13.431.227.130		13.997.099.624		14.679.338.930		15.395.689.717	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100 %	12.544.035.397	100 %	13.431.227.130	100 %	13.997.099.624	100 %	14.679.338.930	100 %	15.395.689.717	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.377.191.397		12.996.003.447		13.645.755.624		14.327.994.930		15.044.345.717	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	78 Orang/Bulan	78 Orang/Bulan	12.377.191.397	78 Orang/Bulan	12.996.003.447	78 Orang/Bulan	13.645.755.624	78 Orang/Bulan	14.327.994.930	78 Orang/Bulan	15.044.345.717	
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				165.500.000		433.879.683		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	165.500.000	12 Dokumen	433.879.683	12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	350.000.000	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				448.000		448.000		448.000		448.000		448.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	448.000	1 Laporan	448.000	1 Laporan	448.000	1 Laporan	448.000	1 Laporan	448.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				448.000		448.000		448.000		448.000		448.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	2 Laporan	2 Laporan	448.000	2 Laporan	448.000	2 Laporan	448.000	2 Laporan	448.000	2 Laporan	448.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)												
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				448.000		448.000		448.000		448.000		448.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		65.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gayamsari	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	0 Angka	92,00 Angka	5.000.000	92,50 Angka	5.000.000	93,00 Angka	65.000.000	93,50 Angka	5.000.000	94,00 Angka	5.000.000	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		2.500.000		15.000.000		2.500.000		2.500.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	12 Dokumen	2.500.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	2.500.000	12 Dokumen	2.500.000	
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		2.500.000		50.000.000		2.500.000		2.500.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0 Orang	50 Orang	2.500.000	50 Orang	2.500.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	2.500.000	50 Orang	2.500.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.000.000		550.000.000		730.000.000		510.862.522		324.579.763	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gayamsari	100 %	100 %	85.000.000	100 %	550.000.000	100 %	730.000.000	100 %	510.862.522	100 %	324.579.763	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100 Paket	45 Paket	10.000.000	45 Paket	10.000.000	45 Paket	30.000.000	45 Paket	30.000.000	45 Paket	30.000.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		35.000.000		5.000.000		5.000.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6 Paket	8 Paket	5.000.000	8 Paket	5.000.000	8 Paket	35.000.000	8 Paket	5.000.000	8 Paket	5.000.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				35.000.000		500.000.000		500.000.000		310.862.522		124.579.763	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	10 Dokumen	10 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	500.000.000	10 Dokumen	500.000.000	10 Dokumen	310.862.522	10 Dokumen	124.579.763	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)												
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.500.000		250.000.000		68.881.791		5.500.000		5.500.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gaymasari	100 %	100 %	5.500.000	100 %	250.000.000	100 %	68.881.791	100 %	5.500.000	100 %	5.500.000	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.500.000		250.000.000		68.881.791		5.500.000		5.500.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	3 Unit	5.500.000	3 Unit	250.000.000	3 Unit	68.881.791	3 Unit	5.500.000	3 Unit	5.500.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				586.641.745		1.125.543.970		1.125.543.970		1.125.543.970		1.125.543.970	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gayamsari yang selesai ditindaklanjut	100 %	100 %	586.641.745	100 %	1.125.543.970	100 %	1.125.543.970	100 %	1.125.543.970	100 %	1.125.543.970	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				436.641.745		975.543.970		975.543.970		975.543.970		975.543.970	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0 Laporan	12 Laporan	436.641.745	12 Laporan	975.543.970	12 Laporan	975.543.970	12 Laporan	975.543.970	12 Laporan	975.543.970	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kantor yang Disediakan (Laporan)												
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.475.000		541.835.596		410.475.000		370.475.000		370.475.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gayamsari sesuai ketentuan	100 %	100 %	130.475.000	100 %	541.835.596	100 %	410.475.000	100 %	370.475.000	100 %	370.475.000	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.475.000		110.475.000		110.475.000		110.475.000		110.475.000	Kecamatan Gayamsari
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11 Unit	11 Unit	110.475.000	11 Unit	110.475.000	11 Unit	110.475.000	11 Unit	110.475.000	11 Unit	110.475.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		31.360.596		50.000.000		10.000.000		10.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0 Unit	41 Unit	10.000.000	41 Unit	31.360.596	41 Unit	50.000.000	41 Unit	10.000.000	41 Unit	10.000.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		400.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				825.000.000		825.000.000		1.120.000.000		1.045.000.000		1.045.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu (%)	100 %	100 %	825.000.000	100 %	825.000.000	100 %	1.120.000.000	100 %	1.045.000.000	100 %	1.045.000.000	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				55.000.000		55.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000	
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Gayamsari	8 Angka	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	155.000.000	100 %	155.000.000	100 %	155.000.000	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				50.000.000		50.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Kecamatan Gayamsari
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	150.000.000	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertical Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait Kecamatan Gayamsari	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-									Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				625.000.000		625.000.000		745.000.000		745.000.000		745.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Gayamsari	100 %	100 %	625.000.000	100 %	625.000.000	100 %	745.000.000	100 %	745.000.000	100 %	745.000.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Kecamatan Gayamsari
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.000.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	Kelurahan Tambakrejo
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.000.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	Kelurahan Kaligawe
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.000.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	Kelurahan Sawah Besar
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.000.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	Kelurahan Siwalan
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.000.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	Kelurahan Sambirejo
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.000.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	Kelurahan Pandean Lamper
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.000.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	Kelurahan Gayamsari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				145.000.000		145.000.000		220.000.000		145.000.000		145.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Gayamsari	100 %	100 %	145.000.000	100 %	145.000.000	100 %	220.000.000	100 %	145.000.000	100 %	145.000.000	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				75.000.000		75.000.000		150.000.000		75.000.000		75.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelurahan Tambakrejo
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelurahan Kaligawe
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelurahan Sawah Besar

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelurahan Siwalan
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelurahan Sambirejo
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelurahan Pandean Lamper
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelurahan Gayamsari
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib Kecamatan Gayamsari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gayamsari (%)	0 %	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib di Kecamatan Gayamsari	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib di Kecamatan Gayamsari	0 Kegiatan	12 Kegiatan	65.000.000	12 Kegiatan	65.000.000	12 Kegiatan	65.000.000	12 Kegiatan	65.000.000	12 Kegiatan	65.000.000	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	65.000.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				74.117.329		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gayamsari (%)	0 %	85 %	74.117.329	86 %	75.000.000	87 %	75.000.000	88 %	75.000.000	89 %	75.000.000	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				74.117.329		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah di Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan Gayamsari	6 Kegiatan	2 Kegiatan	74.117.329	2 Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	75.000.000	
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				74.117.329		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50 Orang	40 Orang	74.117.329	40 Orang	75.000.000	40 Orang	75.000.000	40 Orang	75.000.000	40 Orang	75.000.000	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				24.255.773.033		24.519.190.000		24.954.190.000		24.954.190.000		24.954.190.000	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari (%)	99 %	100 %	24.255.773.033	100 %	24.519.190.000	100 %	24.954.190.000	100 %	24.954.190.000	100 %	24.954.190.000	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				465.000.000		694.550.000		1.129.550.000		1.129.550.000		1.129.550.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan hasil musrenbang di Kecamatan Gayamsari	80 Angka	80 Kegiatan	465.000.000	80 Kegiatan	694.550.000	80 Kegiatan	1.129.550.000	80 Kegiatan	1.129.550.000	80 Kegiatan	1.129.550.000	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah				15.000.000		15.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kecamatan Gayamsari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000		100.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100.000.000	6 Pokmas / Ormas	100.000.000	6 Pokmas / Ormas	500.000.000	6 Pokmas / Ormas	500.000.000	6 Pokmas / Ormas	500.000.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		87.800.000		87.800.000		87.800.000		87.800.000	Kelurahan Tambakrejo
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	6 Pokmas / Ormas	87.800.000	6 Pokmas / Ormas	87.800.000	6 Pokmas / Ormas	87.800.000	6 Pokmas / Ormas	87.800.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		86.600.000		86.600.000		86.600.000		86.600.000	Kelurahan Kaligawe
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	6 Pokmas / Ormas	86.600.000	6 Pokmas / Ormas	86.600.000	6 Pokmas / Ormas	86.600.000	6 Pokmas / Ormas	86.600.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		86.150.000		86.150.000		86.150.000		86.150.000	Kelurahan Sawah Besar

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-									Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	6 Pokmas / Ormas	86.150.000	6 Pokmas / Ormas	86.150.000	6 Pokmas / Ormas	86.150.000	6 Pokmas / Ormas	86.150.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		56.200.000		56.200.000		56.200.000		56.200.000	Kelurahan Siwalan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	6 Pokmas / Ormas	56.200.000	6 Pokmas / Ormas	56.200.000	6 Pokmas / Ormas	56.200.000	6 Pokmas / Ormas	56.200.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		83.600.000		83.600.000		83.600.000		83.600.000	Kelurahan Sambirejo
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	6 Pokmas / Ormas	83.600.000	6 Pokmas / Ormas	83.600.000	6 Pokmas / Ormas	83.600.000	6 Pokmas / Ormas	83.600.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		94.100.000		94.100.000		94.100.000		94.100.000	Kelurahan Pandean Lamper
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	6 Pokmas / Ormas	94.100.000	6 Pokmas / Ormas	94.100.000	6 Pokmas / Ormas	94.100.000	6 Pokmas / Ormas	94.100.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		85.100.000		85.100.000		85.100.000		85.100.000	Kelurahan Gayamsari
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	6 Pokmas / Ormas	85.100.000	6 Pokmas / Ormas	85.100.000	6 Pokmas / Ormas	85.100.000	6 Pokmas / Ormas	85.100.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kelurahan (Pokmas / Ormas)												
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				23.790.773.033		23.824.640.000		23.824.640.000		23.824.640.000		23.824.640.000	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gayamsari	768 Angka	4 Laporan	23.790.773.033	4 Laporan	23.824.640.000	4 Laporan	23.824.640.000	4 Laporan	23.824.640.000	4 Laporan	23.824.640.000	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.903.120.000		2.903.120.000		2.903.120.000		2.903.120.000		2.903.120.000	Kelurahan Tambakrejo
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.020.280.000		4.020.280.000		4.020.280.000		4.020.280.000		4.020.280.000	Kelurahan Kaligawe
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.929.160.000		2.929.160.000		2.929.160.000		2.929.160.000		2.929.160.000	Kelurahan Sawah Besar
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun n-										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.013.880.000		2.013.880.000		2.013.880.000		2.013.880.000		2.013.880.000	Kelurahan Siwalan
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.808.240.000		2.808.240.000		2.808.240.000		2.808.240.000		2.808.240.000	Kelurahan Sambirejo
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.400.680.000		5.400.680.000		5.400.680.000		5.400.680.000		5.400.680.000	Kelurahan Pandean Lamper
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.567.280.000		3.567.280.000		3.567.280.000		3.567.280.000		3.567.280.000	Kelurahan Gayamsari
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	
Meningkatnya fungsi koordinasi Lembaga Kemasyarakatan dan Instansi terkait di Kecamatan Gayamsari	Persentase Peningkatan Kapsitas Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Gayamsari	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kecamatan Gayamsari
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	*Indikator Outcome/Output*	*Baseline 2024*	*Target dan Pagu Indikatif Tahun n-*										*Keterangan*
			2026		*2027*		*2028*		*2029*		*2030*		
			Target	*Pagu*	*Target*	*Pagu*	*Target*	*Pagu*	*Target*	*Pagu*	*Target*	*Pagu*	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	100 %	100 %	16.133.033	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				16.133.033		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kecamatan Gayamsari
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4 Laporan	2 Laporan	16.133.033	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	

Dalam rangka optimmalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2025-2029, Kecamatan turut berperan aktif dalam peningkatan PAD melalui retribusi penyewaan aset di kecamatan dan kelurahan. Berikut akan dijelaskan secara rinci untuk target pendapatan kecamatan gayamsari .

Tabel 4.4
Rencana Pendapatan Kecamatan Gayamsari
Kota Semarang

No.	**Uraian Pendapatan**	**Baseline 2024**	**TARGET TAHUN**					**Keterangan**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1.	Kegiatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	43.625.000	41.800.000	45.980.000	50.578.000	55.635.800	61.199.380	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Gayamsari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut.

4.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gayamsari yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan : Meningkatkan Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari									
	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gayamsari	Angka	N/A	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan									
	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan	Angka	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan									
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	N/A	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	

Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Gayamsari
Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Layanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)	Persen	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99,30	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Gayamsari Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Gayamsari dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Urusan Kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Gayamsari. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Kecamatan Gayamsari ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Gayamsari.

Permasalahan belum optimalnya lembaga kemasyarakatan aktif, trantibum dan pelayanan publik kepada masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Gayamsari . Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Gayamsari.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Beberapa tahapan pelaksanaan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gayamsari untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang telah dikemukakan dalam dokumen renstra Adalah Penyempurnaan SOP pelaksanaan pelayanan yang nantinya akan dijadikan pedoman pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Gayamsari, Pelaksanaan patrol rutin di wilayah Kecamatan Gayamsari untuk menekan angka kejadian yang mengganggu trantibum dan juga penguatan lembaga dan pemantapan sistem pelayanan publik yang berorientasi kepuasan Masyarakat.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Gayamsari. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Gayamsari sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Kecamatan Gayamsari Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

51. KECAMATAN PEDURUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, tugas pokok dari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan kewilayahan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah maka Kecamatan Pedurungan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
27. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Kecamatan Pedurungan beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan kecamatan secara berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pedurungan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan sebagai perangkat daerah wilayah dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat.
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang, khususnya yang terkait dengan urusan pemerintahan kewilayahan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), serta Penetapan Kinerja Kecamatan Pedurungan.
4. Menjadi dasar dalam evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan kecamatan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pedurungan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan

Pedurungan. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Kecamatan Pedurungan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Pedurungan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang telah diubah melalui Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, tugas pokok dari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan kewilayahan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Pedurungan mempunyai fungsi:

- TUGAS

  Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

- FUNGSI

  Camat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
c. penyelenggaraan pembinaankepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
e. penyelenggaraan kerjasama;
f. penyelenggaraan sekretariat;
g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pedurungan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

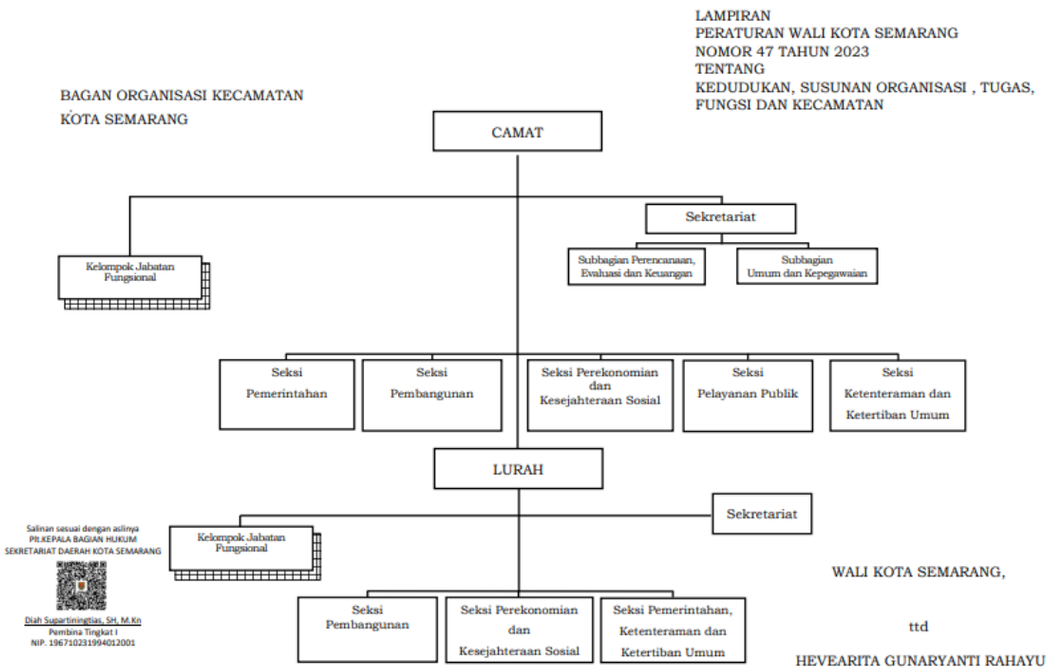

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Kota Semarang

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Agustus 2024

2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Pedurungan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Kecamatan, Kecamatan Pedurungan memiliki uraian tugas jabatan struktural sebagai berikut:

1. Camat

   Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

2. Sekretaris Kecamatan

   Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi

Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

3. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
   Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
   b. membagi tugas kepada bawahan;
   c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
   d. memeriksa hasil kerja bawahan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
   f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
   h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
   i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
   j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
   k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
   l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
   n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
   o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di Lingkungan Kecamatan;
   p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
   q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
   r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
   s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
   t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
   u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
   v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;dan
   w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
   Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. membagi tugas kepada bawahan;
   c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
   d. memeriksa hasil kerja bawahan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Kecamatan;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW,di wilayah kerjanya;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;

q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pembangunan
Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
n. menyiapkan kegiatanfasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
q. menyiapkan kegiatan fasilitasipemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan Lingkungan;

r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Perekonomian & Kesejahteraan Sosial
Kepala Seksi Perekonomian & Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
p. Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
r. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
s. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlabalainnya;
t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
v. menyiapkan kegiatan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian & kesejahteraan sosial
z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian & Kesejahteraan Sosial;
bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian & Kesejahteraan Sosial;
cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian & Kesejahteraan Sosial;
ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian & Kesejahteraan Sosial;
ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pelayanan Publik
Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
k. menyiapkan kegiatanpembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, Lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
   Kepala Seksi Ketrentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   b. membagi tugas kepada bawahan;
   c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
   d. memeriksa hasil kerja bawahan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
   f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
   j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
   k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
   l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
   n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
   o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
   p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
   q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
   r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
   s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
   t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
   u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
   v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
   w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
   x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
   y. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   z. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   aa. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   bb. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   cc. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing.

11. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Pedurungan

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Pedurungan per Agustus 2024 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi ini berjumlah 92 pegawai. Dari jumlah tersebut, 15 ASN merupakan lulusan S2 (16,30%), 48 ASN lulusan S1 (52,17%), dan 15 ASN lulusan DIII (16,30%). Di sisi lain, terdapat pula 41 pegawai Non-ASN, di mana 12 di antaranya adalah lulusan DIII (29,27%). Secara keseluruhan, total pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi sangat mendominasi, dengan lulusan S1 menjadi yang paling banyak. Ini menunjukkan bahwa ASN dan Non-ASN memiliki kualifikasi pendidikan yang baik, terutama pada jenjang pendidikan tinggi.

Namun, terdapat juga pegawai dengan jenjang pendidikan bukan perguruan tinggi. Sebanyak 13 ASN adalah lulusan SMA (14,13%), dan 1 ASN lulusan SMP (1,09%). Sementara itu, untuk Non-ASN, 29 pegawai merupakan lulusan SMA, yang mewakili 70,73% dari total Non-ASN. Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA, baik ASN maupun Non-ASN, mencapai 42 orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pegawai memiliki pendidikan perguruan tinggi, ada proporsi yang cukup besar dari pegawai dengan pendidikan menengah, khususnya di kalangan Non-ASN. Jumlah total pegawai ASN dan Non-ASN mencapai 133 orang, dengan komposisi pendidikan yang beragam.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai ASN & Non ASN di Kecamatan Pedurungan tahun 2024 berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan Diakui	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Presentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Presentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
A	**Perguruan Tinggi**	**78**	**84,78%**	**58,65%**	**12**	**29,27%**	**9,02%**
1	S2	15	16,30%	11,28%	0	0,00%	0,00%
2	S1	48	52,17%	36,09%	0	0,00%	0,00%
3	DIII	15	16,30%	11,28%	12	29,27%	9,02%
B	**Bukan Perguruan Tinggi**	**14**	**15,22%**	**10,53%**	**29**	**70,73%**	**21,80%**
1	SMA	13	14,13%	9,77%	29	70,73%	21,80%
2	SMP	1	1,09%	0,75%	0	0,00%	0,00%
Jumlah		92	100%	69,17%	41	100%	30,83%
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		**133 Pegawai**					

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2024

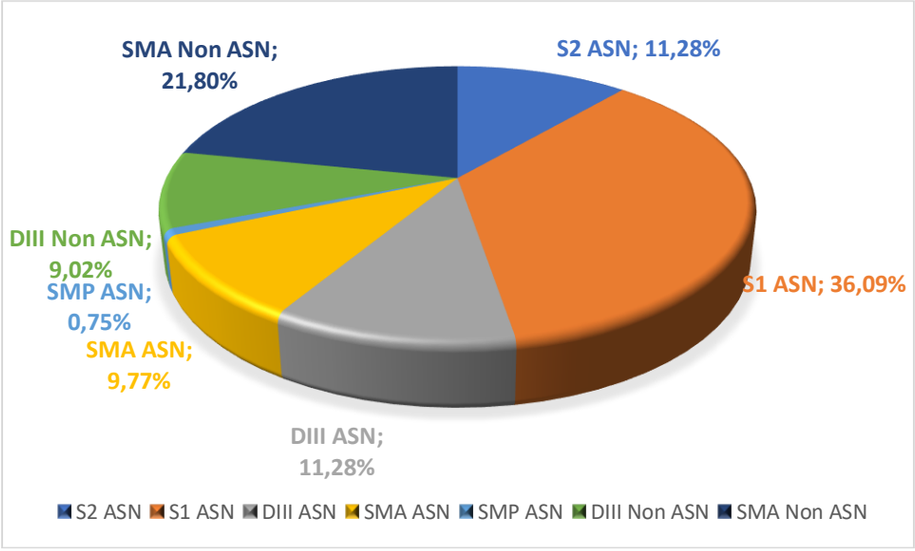

Gambar 2. 3 Komposisi Pegawai ASN & Non ASN Kecamatan Pedurungan tahun 2024 berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2024

Selanjutnya, pegawai ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari 92 pegawai, golongan IV sebanyak 10 pegawai (10,87 %), golongan III sebanyak 58 pegawai (63,04 %), golongan II sebanyak 23 pegawai (25,00 %), dan golongan I sebanyak 1 pegawai (1,09 %). Secara detail, dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai ASN & Non ASN di Kecamatan Pedurungan tahun 2024 berdasarkan Golongan

No	Golongan / Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Pegawai ASN (%)	Jumlah Pegawai per Golongan
1	I/d	1	1,09%	1
2	II/c	18	19,57%	23
3	II/d	5	5,43%	
4	III/a	4	4,35%	58
5	III/b	8	8,70%	

No	Golongan / Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Pegawai ASN (%)	Jumlah Pegawai per Golongan
6	III/c	24	26,09%	
7	III/d	22	23,91%	
8	IV/a	9	9,78%	10
9	IV/b	1	1,09%	
Jumlah Pegawai		**92**	**100%**	**92**

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2024

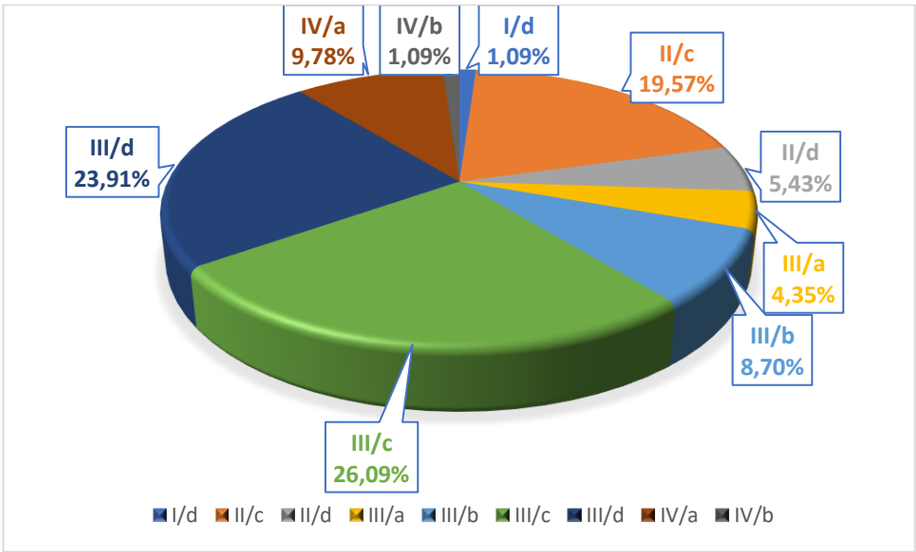

Gambar 2. 4 Komposisi Pegawai ASN & Non ASN Kecamatan Pedurungan tahun 2024 berdasarkan Golongan/ Ruang

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2024

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana di Kecamatan Pedurungan meliputi berbagai elemen penting yang mendukung operasional dan pelayanan publik. Di antaranya adalah tanah dan gedung yang digunakan sebagai kantor dan fasilitas pelayanan masyarakat, serta peralatan mesin yang mendukung aktivitas sehari-hari. Selain itu, kendaraan roda tiga juga tersedia untuk mendukung kebersihan dan pengelolaan lingkungan di kecamatan. Keberadaan sarana dan prasarana ini sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pedurungan.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dapat dilihat pada tabel - tabel berikut.

Tabel 2. 3 Daftar Tanah Aset Kecamatan Pedurungan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat
1	Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun	27.990	1979	Jl. Gasem Raya RW. 03 Kel Tlogomulyo Kec Pedurungan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	465	1979	jl.Dolog Lor No.1 Rt.10/I Kel Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.020	1979	jl. Supriyadi No. 20, Kel Kalicari Kec Pedurungan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat
4	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1.723	1979	Jl. Tlogosari Raya No. 18, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan
5	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1.887	1979	jl. Supriyadi No. 20, Kel kalicari Kec Pedurungan
6	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2.170	1979	JL.Isbaryadi Rt.02 Rw.05
7	Tanah Pertanian lainnya	11.618	1979	JL.Isbariyadi Rt.02 Rw.05 Ped.Lor
8	Tanah Pertanian lainnya	3.975	1979	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul Kec. Pedurungan
9	Tanah Pertanian lainnya	4.930	1979	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul. Kec. Pedurungan
10	Tanah Pertanian lainnya	12.340	1979	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul. Kec. Pedurungan
11	Tanah Pertanian lainnya	4.440	1979	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. penggaron Kidul. Kec. Pedurungan
12	Tanah Pertanian lainnya	4.580	1979	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul. Kec. pedurungan
13	Tanah Pertanian lainnya	3.005	1979	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul Kc. Pedurungan
14	Tanah Pertanian lainnya	9.840	1979	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul. Kec. Pedurungan
15	Tanah Pertanian lainnya	10.470	1979	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang
16	Tanah Pertanian lainnya	2.985	1979	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul. kec. Pedurungan
17	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12.400	1989	Jl. Gemah Barat, Gemah, Pedurungan
18	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.105	1989	Jl. Gemah Barat
19	Tanah Lapangan Sepak Bola	4.828	1989	Jl. Gemah Tengah
20	Tanah Bangunan Industri Bengkel	1.000	1991	Jl. Sendangguwo Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
21	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	36.035	1991	Jalan Terminal Penggaron RT.04 RW.IV
22	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.124	1992	Jl. Kawung IV RT.5 RW XIV Kelurahan Tlogosari Kulon
23	Tanah Lapangan Taman lainnya	1.477	1992	Jl. Taman Sido Mulyo II, RT. 03 RW. 20, Kel. Muktiharjo Kidul
24	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1.000	1993	Jl. Ganesha Mukti Utara II RT.01 RW.IV, Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan
25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	632	1993	JL. BRIGJEN SUDIARTO KM 11 RT.01 RW. IV Kel. Penggaron Kidul
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.420	1993	Jl. Taman Tlogomulyo No. 1, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	17.000	1993	Bugen RT 1 RW 3, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.750	1993	Jl. Sidomukti No. 124A, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.000	1993	Jl. Brigjend Sudiarto No. 357, Semarang
30	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.826	1993	Jl. Sapta Prasetya Raya No. 1 RT.01 RW.I
31	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	1993	Jl. Soekarno Hatta No. 10. RT. 01 RW. 01, Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan
32	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.470	1993	Jl. Panda Raya NO. 86 RT.07 RW. 10, Kel. Palebon, Kecamatan Pedurungan
33	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	575	1993	Jl. Panda Raya RT.07 RW. 10, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan
34	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.785	1993	Jl. Tlogosari Raya No. 18 RT01 RW.01 Kelurahan Tlogosari Kulon
35	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	6.296	1993	Jl. Isbaryadi RT 2 RW V
36	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	3.050	1993	JL. BRIGJEN SUDIARTO KM.11 RT.01 RW. IV Kel. Penggaron Kidul
37	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1.799	1993	Jl. Kamiluto Raya Kel. Muktiharjo Kidul
38	Tanah Untuk Bangunan Masjid	680	1993	Jl. Sido Drajat I Kel. Muktiharjo Kidul
39	Tanah Untuk Bangunan Masjid	601	1993	Jl. Sido Mulyo II RW. 20 Kel. Muktiharjo Kidul
40	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1.084	1993	Jl. Taman Sido Mukti Raya, Kel. Muktiharjo Kidul
41	Tanah Untuk Bangunan Masjid	420	1993	Jl. Taman Grinsing Kel. Muktiharjo Kidul
42	Tanah Untuk Bangunan Masjid	571	1993	Jl. Sapta Prasetya Raya No.2 RT. 01 RW.I
43	Tanah Untuk Bangunan Gereja	597	1993	Jl. Taman Sido Luhur/Bokor kencono no. 40
44	Tanah Sawah Irigasi	13.285	1993	JL. Sapen Raya RT 3 RW III
45	Tanah Sawah Irigasi	11.550	1993	JL.Sapen Raya RT 3 RW III
46	Tanah Sawah Irigasi	7.260	1993	Jl. Sapen Raya RT 3 RW III
47	Tanah Sawah Irigasi	7.670	1993	JL.Sapen Raya RT 3 RW III
48	Tanah Sawah Irigasi	9.580	1993	Jl. Sapen Raya RT 3 RW III
49	Tanah Sawah Irigasi	3.130	1993	JL.Sapen Raya RT 3 RW III
50	Tanah Sawah Irigasi	6.335	1993	Jl. Kyai Morang RT.04 RW VI SRIMPI
51	Tanah Sawah Irigasi	13.250	1993	Jll. Kyai Morang RT 4 RW VI SRIMPI

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Penga-daan	Letak / Alamat
52	Tanah Sawah Irigasi	24.050	1993	Jl. Kyai Morang RT 4 RW VI SRIMPI
53	Tanah Sawah Irigasi	5.900	1993	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang kel Penggaron Kidul Kec. Pedurungan
54	Tanah Sawah Irigasi	11.100	1993	Jl. Sapen Raya RT. 03 RW. 06, Kel. Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan
55	Tanah Sawah Irigasi	9.250	1993	Jl. Kyai Morang RT 4 RW VI SRIMPI
56	Tanah Sawah Irigasi	3.750	1993	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul. Kec. pedurungan
57	Tanah Sawah Irigasi	3.750	1993	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul Kc. Pedurungan
58	Tanah Sawah Irigasi	4.050	1993	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. penggaron Kidul. Kec. Pedurungan
59	Tanah Sawah Irigasi	24.150	1993	Jl. Kyai Morang RT 4 RW VI SRIMPI
60	Tanah Sawah Irigasi	10.600	1993	JL. MASUK TERMINAL RT.04 RW. IV
61	Tanah Sawah Irigasi	12.400	1993	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul. kec. Pedurungan
62	Tanah Sawah Irigasi	8.500	1993	JL. MASUK TERMINAL RT.04 RW. IV
63	Tanah Tegalan	6.000	1993	Jl. Perum Dolog Lor No. 1 RT. 01 RW. 01, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan
64	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.435	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 15
65	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	13.000	1993	Kel. Muktiharjo Kidul
66	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	17.420	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 23
67	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	20.020	1993	Dempel lor RW. 23 Kel. Muktiharjo Kidul
68	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	301	1993	Jl. Fatmawati, Gemah, Pedurungan
69	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4.000	1993	Jl. Pedurungan Lor RT 1 RW V
70	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	8.220	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 24
71	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.962	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 19
72	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3.120	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 7
73	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.950	1993	Jl. Condrore8jo RW. 11 Kel. Muktiharjo Kidul
74	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5.795	1993	Jl. Sidomukti RW. 17 Kel. Muktiharjo Kidul
75	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.695	1993	Kel. Muktiharjo Kidul

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat
76	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.820	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 24
77	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.590	1993	Kel. Muktiharjo Kidul
78	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3.640	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 15
79	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.720	1993	Kel. Muktiharjo Kidul
80	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.560	1993	Kel. Muktiharjo Kidul
81	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.403	1993	Jl. Taman Tejokusumo RW. 05, 06, 17, 18 , Kel. Muktiharjo Kidul
82	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7.450	1993	Kel. Muktiharjo Kidul
83	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4.470	1993	Kel. Muktiharjo Kidul jl.Murti mulyo RW. 15
84	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.360	1993	Jl. Sidomukti IX Kel. Muktiharjo Kidul
85	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.990	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 08
86	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5.290	1993	RW. 04 Kel. Muktiharjo Kidul
87	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.630	1993	Kel. Muktiharjo Kidul
88	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	8.450	1993	Dempel berlian RW. 25 Kel. Muktiharjo Kidul
89	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	11.750	1993	Kel. Muktiharjo Kidul
90	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	13.380	1993	Kel. Muktiharjo Kidul
91	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5.250	1993	Kel. Muktiharjo Kidul Jl. Dempel berlian IX
92	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	29.830	1993	Jl. Ampel Sari Raya, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan
93	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	15.240	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 19
94	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	17.110	1993	Kel. Muktiharjo Kidul RW. 23
95	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7.000	1993	Kel. Muktiharjo Kidul
96	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.400	1993	Jl. Pedurungan Lor RT 2 RW VII
97	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.391	1993	Jl. Taman Tlogomulyo RT.02 RW.VI, Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan
98	Tanah Lapangan Sepak Bola	14.529	1993	Jl. Taman Tlogomulyo, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan
99	Tanah Lapangan Sepak Bola	7.536	1993	Jl. PLAMONGAN ELOK IV RT.03 RW.XI DAN JL. MARGISARI RW XI

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat
100	Tanah Lapangan Sepak Bola	8.213	1993	Jl. Sapta Prasetya Barat RT.01 RW.III Kelurahan Pedurungan Kidul
101	Tanah Lapangan Sepak Bola	3.610	1993	Jl. Panda Dalam, RT. 07 RW. V Kelurahan Palebon Semarang
102	Tanah Lapangan Sepak Bola	7.000	1993	Jl. Pedurungan Tengah VI RT.02 RW.II Kelurahan Palebon
103	Tanah Lapangan Bola Volly	3.401	1993	Jl. Taman Sekar Jagat RT.02 RW. 28
104	Tanah Untuk Makam Umum	6.000	1993	Jl. Pedurungan Lor RT. 03 RW.VIII
105	Tanah Lapangan Taman lainnya	1.541	1993	Jl. Sido Drajat V RW. 19 Kel. Muktiharjo Kidul
106	Tanah Lapangan Taman lainnya	739	1993	Jl. Taman Sido Luhur Kel. Muktiharjo Kidul
107	Tanah Lapangan Taman lainnya	874	1993	Jl. Taman Grinsing RW. 2 Kel. Muktiharjo Kidul
108	Tanah Lapangan Taman lainnya	512	1993	Jl. Taman Sido Mukti Raya Kel. Muktiharjo Kidul
109	tanah kampung lainnya (dst)	8.173	1993	Jl. Pedurungan Tengah VI RT.01 RW.2 Kelurahan Palebon
110	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.399	1994	Jl. Supriyadi No. 20 RT.06 RW.III
111	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.476	1994	Jl. Muwardi Raya RT.02 RW VI
112	Tanah Lapangan Sepak Bola	6.159	1994	Jl. Supriyadi, kel Kalicari, Kec Pedurungan
113	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	950	1995	Jl.Plamongansari V RT.03 RW. IX
114	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.000	1995	Jl. Plamongansari V RT.03 RW. IX
115	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.017	1995	Jl.Plamongansari V RT.03 RW.IX
116	Tanah Lapangan Sepak Bola	5.250	1995	Jl. Plamongan sari V RT.03 RW. IX
117	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.012	1996	Jl. Gemah Tengah
118	Tanah Untuk Bangunan Masjid	228	2001	Jl. Sido Luhur XIII
119	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2.022	2006	Jl. Udan Riris III RT.07 RW.XV
120	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1.008	2007	Jl. Kembang Jeruk V RT.01 RW.VII
121	Tanah Untuk Bangunan Masjid	975	2007	Jl. Parang Kembang VI RT. 06 RW.XX
122	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1.923	2007	Jl. Satrio Wibowo RT.09 RW.VI
123	Tanah Untuk Bangunan Masjid	410	2007	Jl. Taman Gusti Putri RT.01 RW.IV

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat
124	Tanah Untuk Bangunan Gereja	532	2007	Jl. Udan Riris III RT.07 RW.XV
125	Tanah Untuk Bangunan Pura	1.740	2007	Jl. Udan Riris I RT.05 RW.XV
126	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	771	2007	Jl. Taman Lintang Trenggono RT.02 RW.XVIII
127	Tanah Lapangan Taman lainnya	1.192	2007	Jl. Parang Barong III RT.02 RW.IX
128	Tanah Lapangan Taman lainnya	1.375	2007	Jl. Tmn. Lintang Trenggono RT.01 RW.XVIII
129	Tanah Lapangan Taman lainnya	491	2007	Jl. Truntum V RT.03 RW.XI
130	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.906	2008	Jl. Satrio Wibowo I RT.04 RW.IX
131	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	708	2008	Jl. Parang Baris I /RT. 03 RW XV
132	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.006	2008	Jl. Seruni IV RT. 06 RW.X
133	Tanah Untuk Bangunan Masjid	702	2008	Jl. Kawung VI RT.04 RW. XIV
134	Tanah Untuk Bangunan Masjid	595	2008	Jl. Parang Baris V RT.03 RW XV
135	Tanah Untuk Bangunan Masjid	433	2008	Jl. Parang Barong III RT.02 RW.IX
136	Tanah Untuk Bangunan Masjid	808	2008	Jl. Parang Kusumo Raya RT.01 RW.II
137	Tanah Untuk Bangunan Masjid	559	2008	Jl. Parang Sarpo IV RT.04 RW.XIII
138	Tanah Untuk Bangunan Masjid	881	2008	Jl. Wahyu Temurun X RT. 05 RW.XXI
139	Tanah Lapangan Tenis	2.571	2008	Jl. Gusti Putri I RT.10 RW. V
140	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	1.192	2008	Jl. Parang Barong VI RT. 05 RW.IX, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan
141	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	3.873	2008	Jl. Taman Ratu Ratih RT.02 RW.XXI
142	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	1.827	2008	Jl. Gusti Putri III RT.07 RW IV Kel. Tlogosari Kulon
143	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	785	2008	Jl. Parang Kusumo Raya III RT.03 RW II Kelurahan Tlogosari Kulon
144	Tanah Lapangan Bola Volly	479	2008	Jl. Taman Sekar Jagat RT.02 RW XXVIII
145	Tanah Lapangan Bola Volly	1.103	2008	Jl. Parang Baris I RT.02 RW XV
146	Tanah Lapangan Bola Volly	959	2008	Jl. Seruni IV RT.06 RW.X
147	Tanah Lapangan Bola Volly	986	2008	Jl. Parang Sarpo VIII RT. 03 RW XII Kel. Tlogosari Kulon

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat
148	Tanah Lapangan Bola Volly	2.724	2008	Jl. Taman Satrio Manah RT 09 / RW XI
149	Tanah Lapangan Bola Volly	1.037	2008	Jl. Kembang Jeruk V RT.01 RW.VIII Kel Tlogosari Kulon
150	Tanah Lapangan Bola Volly	610	2008	Jl. Truntum II RT. 06 RW XI
151	Tanah Lapangan Bola Volly	1.251	2008	Jl. Lintang Trenggono IV RT.04 RW XVIII
152	Tanah Lapangan Bola Volly	2.850	2008	Jl. Parang Kembang RayaRT.02 RW XX
153	Tanah Lapangan Bola Volly	841	2008	Jl. Bledak Kantil IV RT.03 RW VI, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan
154	Tanah Lapangan Bola Volly	806	2008	Jl. Parang Kesit Raya RT 03 / RW V Tlogosari Kulon
155	Tanah Lapangan Bola Volly	1.710	2008	Jl. Parang Kusumo Raya RT. 06 RW II Kel. Tlogosari Kulon
156	Tanah Lapangan Taman lainnya	894	2008	Jl. Bledak Kantil II RT.03 RW.VI
157	Tanah Lapangan Taman lainnya	819	2008	Jl. Bledak Anggur V RT.06 RW.IV
158	Tanah Lapangan Taman lainnya	795	2008	Jl. Bledak Kantil V RT.06 RW.VI
159	Tanah Lapangan Taman lainnya	1.256	2008	Jl. Galar Raya RT. 05 RW XVI
160	Tanah Lapangan Taman lainnya	467	2008	Jl. Galar Raya RT.06 RW.XVI
161	Tanah Lapangan Taman lainnya	702	2008	Jl. Kawung VI RT.03 RW.XIV
162	Tanah Lapangan Taman lainnya	849	2008	Jl. Wahyu Temurun X RT.004 RW.XXI
163	Tanah Lapangan Taman lainnya	975	2008	Jl. Parang Klitik Raya RT 05 / RW XIX Kel. Tlogosari Kulon
164	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400	2011	Jl. Pedurungan Tengah VI RT.01 RW.02 Kelurahan Palebon
165	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1.696	2012	JL. PANDA TENGAH RT. 01 RW X KEL. PALEBON
166	Tanah Sawah Irigasi	5.000	2014	Jl. Jambon/Jl. Kyai Morang Kel. Penggaron Kidul. Kec. Pedurungan
167	Tanah Sawah Irigasi	1.395	2014	JL. SAPEN RAYA RT.03 RW. III
168	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	130	2019	Jalan Gemah Tengah No. 5A, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan

Sumber : SIMDA Kecamatan Pedurungan, per Agustus 2024

Tabel 2. 4 Daftar Aset Gedung/ Bangunan Kecamatan Pedurungan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Alamat
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Taman Tlogomulyo No. 1, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Alamat
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Taman Tlogomulyo No. 1, Kel.Tlogomulyo, Kec. Pedurungan
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Perum Dolog Lor, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Tlogosari Raya No.18
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Sido Mukti I / 24 A, Kel. Muktiharjo Kidul
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Plamongansari V
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 367, Semarang
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 357, Semarang
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Gemah Tengah, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Sapta Prasetya Raya no.2, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Sapta Prasetya Raya No.2, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Isbariyadi RT. 02 RW. 05, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Soekarno Hatta No.10, Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Panda Raya No.86, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan
15	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 357, Semarang
16	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 367, Semarang
17	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Isbariyadi RT. 02 RW. 05, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan
18	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Soekarno Hatta No.10
19	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl.Panda Raya No. 86, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan
20	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Jl. Fatmawati, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto Km.11
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto Km. 11
23	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Plamongansari V, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Supriyadi No.20, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Supriyani No. 20, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan
26	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl. Taman Tlogomulyo No. 1, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan
27	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl. Perum Dolog Lor No. 1, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan
28	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl. Tlogosari Raya No.18
29	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl. Sido Mukti I / 24 A, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Alamat
30	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl. Plamongansari V
31	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 357, Semarang
32	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl. Sapta Prasetya Raya No.2
33	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl. Isbariyadi RT. 02 RW. 05, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan
34	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl.Ganesha Mukti Utara, Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan
35	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Jl. Panda Raya No.86, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan
36	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Sapta Prasetya Raya no. 2
37	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Brigjend Sudiarto No. 357
38	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Plamongansari V, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan
39	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Supriyadi No. 20, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan
40	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Jl. Brigjend Sudiarto No. 357, Semarang
41	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Perum Dolog Lor, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan
42	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 11, Semarang
43	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Brigjen Sudiartiarto No.357 Semarang
44	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Jl. Pedurungan Tengah VI, Kel Palebon Kec Pedurungan
45	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Rumah Dinas Camat, Jl. Brigjend Sudiarto No. 357, Semarang
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Brigjend Sudiarto No. 357, Semarang
47	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Jl. Taman Tlogomulyo Cluster, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan
48	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	Jl. Perum Dolog Lor, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan
49	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Kyai Morang VI RT.01 / RW.05
50	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Malangsari II RT.02 / RW.03
51	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Dempel Lor RT.06 / RW.14
52	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Kalicari II RT.02 / RW.03
53	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Jl. Taman Sendangsari, RW. 1, Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan
53	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Bugen, RT. 02 RW. 03 Kel.Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan
54	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Sendangsari Utara X, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan
55	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Kompak, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan
56	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Bokor Kencono, Kel. Muktiharjokidul, Kec. Pedurungan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Alamat
57	Tugu Pembangunan	Jl. Blancir Sari III RT. 02 RW. 11, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan
58	Tugu Pembangunan	Jl. Pedurungan Kidul 6 RW. 1 Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan
59	Tugu Pembangunan	Jl. Purwomukti Timur Raya, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan
60	Tugu Pembangunan	Jl. Depok 1 RW. 10 Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan
61	Tugu Pembangunan	Jalan Kalicari Tengah III, RW. 9 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan
62	Pagar Permanen	Jalan Kompak, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan
63	Pagar Permanen	Jl. Wolter Monginsidi, RT. 5 RW. 4, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan
64	Pagar Permanen	Jl. Taman Tlogomulyo No. 1, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan
65	Pagar Permanen	Jl. Perum Dolog Lor No. 1, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 346, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Brigjen Sudiarto No. 367 Semarang
68	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Jl. Brigjend Sudiarto No. 367, Semarang
69	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Jalan Brigjen Sudiarto No 367 Semarang
70	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 367, Semarang
71	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Truntum V, RT 03 RW 11 Kelurahan Tlogosari Kulon
72	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Dempel Mutiara Raya RT.05 RW XXV Kelurahan Muktiharjo Kidul
73	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Tegal Rejo VI RT.06 RW.III, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan
74	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Dempelsari RT 03/ RW 22 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Semarang Timur
75	Gedung Pos Jaga Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 367, semarang
76	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Jl. Brigjen Sudiarto No.367, Semarang
77	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Plamongan Permai Utara I, RW.09 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan
78	Taman Permanen	Jl. Giri Mukti Barat, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan
79	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	JALAN BRIGJEN SUDIARTO NO. 367 SEMARANG
80	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Jl. Wonomulyo Mukti Barat I, RT 02 RW 11 KEL. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan
81	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	BALAI RW 1 Jl TAMAN SENDANGSARI RT.03 RW.I KELURAHAN KALICARI
82	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Lapangan Parang Kesit (Jl. Parang Kesit Raya, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang)
83	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Lapangan Parang Kesit(Jl. Parang Kesit Raya, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang)
84	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Lapangan Gusti Putri(Jl. Taman Gusti Putri, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang)
85	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Taman Lintang Trenggono, RW. 18 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Alamat
86	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Lapangan Parang Barong (Jl. Parang Barong Raya, Tlogosari Kulon, Pedurungan)
87	Gedung Garasi/Pool Permanen	JL. Brigjend Sudiarto NO. 367, Semarang
88	Taman Permanen	Lapangan Gusti Putri (Jl. Taman Gusti Putri, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang)
89	Pilar/tugu/tanda lainnya	Jl. Selo Mulyo Mukti Barat IX RT.01 RW IX Kel. Tlogomulyo
90	Pagar Permanen	Lapangan Parang Kesit (Jl. Parang Kesit Raya, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang)
91	Pagar Permanen	Lapangan Gusti Putri (Jl. Taman Gusti Putri, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang)
92	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Lingkungan Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul Jl. Sidomukti I, Kelurahan Muktiharjo Kidul
93	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Sendangsari I, Kalicari, Pedurungan
94	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Plamongan Elok IV No.544–548, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192
95	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Kyai Syakir RT 01 RW 03
96	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Panda Dalam, Palebon
97	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Lapangan Banpres Pedurungan, Jl. Pedurungan Tengah VI, Palebon, Pedurungan
98	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Kamiluto III, Kelurahan Muktiharjo Kidul
99	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Jl. Taman Lintang Trenggono, Kelurahan Tlogosari Kulon
100	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Jl. Brigjend Sudiarto No. 349 A, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan
101	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Jl. Brigjend Sudiarto No. 367 Pedurungan, Kota Semarang
102	Pagar Permanen	Jl. Brigjend Sudiarto No. 349A, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Sendangguwo Baru No. II, Kelurahan Gemah
104	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Kompleks Kantor Kecamatan Pedurungan, Jl. Brigjend Sudiarto No. 367, Semarang
105	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Brigjen Sudiarto No. 367, Semarang

Sumber: *SIMDA Kecamatan Pedurungan, Agustus 2024*

Tabel 2. 5 Daftar Aset Peralatan Mesin Kecamatan Pedurungan

No	Jenis Barang	Jumlah
Sarana Transportasi		
1	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	6
2	Mobil Workshop	1
3	Pick Up	1
4	Sepeda	15
5	Sepeda Motor	62
6	Sport Utility Vehicle (SUV)	1

No	Jenis Barang	Jumlah
7	Station Wagon	1
8	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	10
9	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1
Sarana Telekomunikasi		
1	Handy Talky (HT)	16
2	Pager	1
3	Unit Tranceiver HF Portable	1
Sarana Peralatan & Perlengkapan Kerja		
1	A.C. Split	16
2	A.C. Window	14
3	Air Conditioning (AC)	21
4	Alat Kantor Lainnya	20
5	Alat Kesehatan olahraga lainnya	2
6	Alat Kesehatan Umum lainnya	1
7	Alat Pemadam/Portable	6
8	Alat Pembantu Kebakaran	2
9	Alat Pembersih lainnya	9
10	Alat Pemotong Kertas	1
11	Alat Pencacah Hijauan	4
12	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	2
13	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	42
14	Alat Rumah Tangga Lain-lain	186
15	Antene VHF/FM Stationary	1
16	Audio Amplifier	4
17	Audio Monitoring Unit	1183
18	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	1
19	Automatic Dispenser	12
20	Bangku Tunggu	27
21	Brandkas	1
22	Buffet Kayu	2
23	Camera Digital	13
24	Camera Electronic	3
25	Camera Video	2
26	CCTV - Camera Control Television System	1185
27	Computer Compatible	4
28	CPU (Peralatan Mainframe)	11
29	CPU (Peralatan Mini Komputer)	3
30	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1
31	Dispenser	9
32	Facsimile	3
33	Filing Cabinet Besi	64
34	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2
35	Handy Cam	1
36	Jam Elektronik	3

No	Jenis Barang	Jumlah
37	Kasur/Spring Bed	1
38	Kipas Angin	39
39	Kompor Gas (Alat Dapur)	1
40	Komputer Unit Lainnya	6
41	Kursi Besi/Metal	1
42	Kursi Biasa	7
43	Kursi Kayu	20
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	67
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	63
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1
48	Kursi Lipat	43
49	Kursi Putar	31
50	Kursi Rapat	472
51	Kursi Tamu	17
52	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	8
53	Lap Top	33
54	Layar Film/Projector	16
55	LCD Projector/Infocus	13
56	Lemari Arsip Pejabat lainnya	28
57	Lemari Besi/Metal	37
58	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5
59	Lemari Display	10
60	Lemari Es	9
61	Lemari Kaca	2
62	Lemari Kayu	21
63	Lemari Makan	1
64	Lemari Obat (Kaca)	1
65	Lemari Penyimpan	33
66	Loudspeaker	14
67	Meja 1/2 Biro	81
68	Meja Kerja	3
69	Meja Kerja Kayu	16
70	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	1
71	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4
72	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8
73	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	35
74	Meja Ketik	1
75	Meja Komputer	33
76	Meja Makan Besi	5
77	Meja Panjang	15
78	Meja Podium	1
79	Meja Rapat	41
80	Meja Resepsionis	12

No	Jenis Barang	Jumlah
81	Meja Tambahan	26
82	Meja Tamu Biasa	4
83	Meja Telepon	1
84	Mesin Absensi	2
85	Mesin Antrian	1
86	Mesin Cuci	1
87	Mesin Fotocopy Folio	1
88	Mesin Gergaji	2
89	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	7
90	Mesin Jahit	1
91	mesin ketik lainnya (dst)	1
92	Mesin Ketik Braille	1
93	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	3
94	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	3
95	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	19
96	Mesin Pemotong Rumput	75
97	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
98	Meubeleur lainnya	21
99	Microphone	10
100	Microphone Floor Stand	2
101	Microphone Table Stand	13
102	Microphone/Boom Stand	2
103	Mini Komputer	17
104	Monitor	12
105	Note Book	3
106	P.C Unit	53
107	Papan Gambar	13
108	Papan Pengumuman	14
109	Papan Planel	1
110	Peralatan Personal Komputer lainnya	19
111	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1
112	Personal Computer	58
113	Pompa Air	1
114	Pot Besar	20
115	Printer (Peralatan Personal Komputer)	74
116	Rak Besi	7
117	Rak Kayu	6
118	Rak Peralatan	1
119	Rak Terminal Vencing	1
120	Rak-Rak Penyimpan	7
121	recorder display lainnya (dst)	11
122	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
123	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5
124	Scanner (Universal Tester)	14

No	Jenis Barang	Jumlah
125	Shredder	1
126	Sice	3
127	Sirine (Proteksi Lingkungan)	12
128	Slide Projector (Lapangan)	2
129	Sofa	13
130	Sound System	7
131	Tabung Gas	4
132	Tangga Aluminium	15
133	Tangki Air	14
134	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
135	Televisi	22
136	Tempat Tidur Kayu	6
137	Termos A.J	1
138	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	1
139	Timbangan/Neraca	1
140	Tustel	1
141	TV Monitor	5
142	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
143	Unit Power Supply	5
144	Video Conference	1
145	Video Printer	22
146	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	1
147	White Board	12
148	Wireless	7

Sumber: *SIMDA Kecamatan Pedurungan, Agustus 2024*

2.1.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pedurungan

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Pedurungan.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Pedurungan

Kecamatan Pedurungan berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Sebagai bagian dari pemerintah kota, Kecamatan bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program serta kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi utamanya meliputi pengelolaan administrasi pemerintahan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, Kecamatan Pedurungan akan berfokus pada peningkatan kinerja pelayanan melalui pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dengan komitmen ini, Kecamatan Pedurungan berharap dapat memenuhi harapan masyarakat dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya saing.

Pada dokumen Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Kecamatan

Pedurungan di bidang Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Penanganan Kebersihan dan Lingkungan, Pengelolaan Administrasi Pemerintahan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pedurungan Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
01.00	Indikator Tujuan :															
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	89	90	93	88,98	89,35	90,27	92	96,73	102,28 %	101,53 %	101,43 %	102,22 %	104,01 %
02.00	Indikator Sasaran :															
a.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	3	1	N/A	N/A	100,00 %	300,00 %	100,00 %
b.	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
c.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80,00%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	80,00%	95,00%	84,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	86,60%	102,04 %	101,01 %
d.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	43,00%	43,00%	-	-	N/A	43,00%	62.04%	-	-	N/A	100,00 %	144,28 %	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
e.	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	81,68%	83,36%	85,04%	86,72%	-	81,68%	83,36%	97,48%	99,64%	N/A	100,00 %	100,00 %	114,63 %	114,90 %
f.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	-	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	67,00%	78,00%	100,00%	100,00%	N/A	77,01%	86,67%	108,70 %	105,26 %
03.00	Indikator Program :															
a.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-
b.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-
c.	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-
d.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
e.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
f.	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
g.	Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-
h.	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-
i.	Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan RT	88,00%	100,00%	-	-	-	72,37%	100,00%	-	-	-	82,24%	100,00 %	-	-	-
j.	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	168 Bidang Tanah	168 Bidang Tanah	168 Bidang Tanah	168 Bidang Tanah	168 Bidang Tanah	168 Bidang Tanah	168 Bidang Tanah	168 Bidang Tanah	168 Bidang Tanah	168 Bidang Tanah	100,00 %	100,00 %	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
k.	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	3 Kelurahan	6 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	3 Kelurahan	6 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
l.	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan Kelurahan)	1402 Kegiatan	1402 Kegiatan	1402 Kegiatan	1402 Kegiatan	1402 Kegiatan	1205 Kegiatan	1162 Kegiatan	1203 Kegiatan	1368 Kegiatan	1356 Kegiatan	85,95%	82,88%	85,81%	97,57%	96,72%
m.	Persentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72,00%	65,00%	83,00%	89,00%	90,00%	72,00%	65,00%	83,00%	89,00%	90,00%
n.	Presentase Jumlah RT Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	93,81%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	92,53%	93,53%	89,54%	92,43%	93,85%	98,64%	98,45%	94,25%	97,29%	98,79%
o.	Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	99,04%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	98,64%	98,30%	93,54%	94,43%	97,85%	99,60%	98,79%	94,01%	94,90%	98,34%
p.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang	2 Kelurahan	5 Kelurahan	12 Kelurahan	-	-	2 Kelurahan	5 Kelurahan	12 Kelurahan	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
	Berstandar PATEN															
q.	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	5000 Pelayanan	5500 Pelayanan	6000 Pelayanan	6500 Pelayanan	7500 Pelayanan	6452 Pelayanan	5810 Pelayanan	9315 Pelayanan	9563 Pelayanan	10321 Pelayanan	129,04 %	105,64 %	155,25 %	147,12 %	137,61 %
r.	Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	100,00 %	100,00 %	1	1	1
s.	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
t.	Presentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Membayar PBB Di Kecamatan Dan Kelurahan	100,00%	100,00%	-	-	-	71,78%	79,65%	-	-	-	71,78%	79,65%	-	-	-
u.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	-	85,00%	91,00%	92,00%	93,00%	-	85,00%	91,30%	92,32%	93,00%	-	100,00 %	100,33 %	100,34 %	100,00 %
v.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	-	95,00%	99,64%	100,00%	100,00%	-	100,00 %	102,72 %	102,04 %	101,01 %
w.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	0,00%	10,00%	15,00%	20,00%	-	0,00%	62,04%	44,05%	55,56%	-	0,00%	620,40 %	293,66 %	277,80 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/3 x 100%	14 = 9/4 x 100%	15 = 10/5 x 100%	16 = 11/6 x 100%	17 = 12/7 x 100%
x.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	-	85,00%	78,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	94,44%	86,67%	108,69 %	105,26 %
04.00	Indikator Lainnya															
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	N/A	90,21%	91,21%	92,21%	93,21%	N/A	88,56%	90,18%	90,52%	92,92%	N/A	98,17%	98,87%	98,17%	99,69%
b.	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	N/A	N/A	11,14%	10,52%	9,90%	N/A	N/A	5,89%	5,89%	7,42%	-	-	189,13 %	178,61 %	133,42 %
c.	Nilai AKIP	67	68	69	70	71	71,31	71,31	71,31	71,95	72,05	106,43 %	104,87 %	103,35 %	102,79 %	101,48 %

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang memiliki peran strategis dalam membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pelayanan publik Kecamatan Pedurungan adalah melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, mencerminkan adanya perbaikan kualitas layanan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Data capaian IKM tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2. 7 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pedurungan

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,98	89,35	90,27	92	96,73

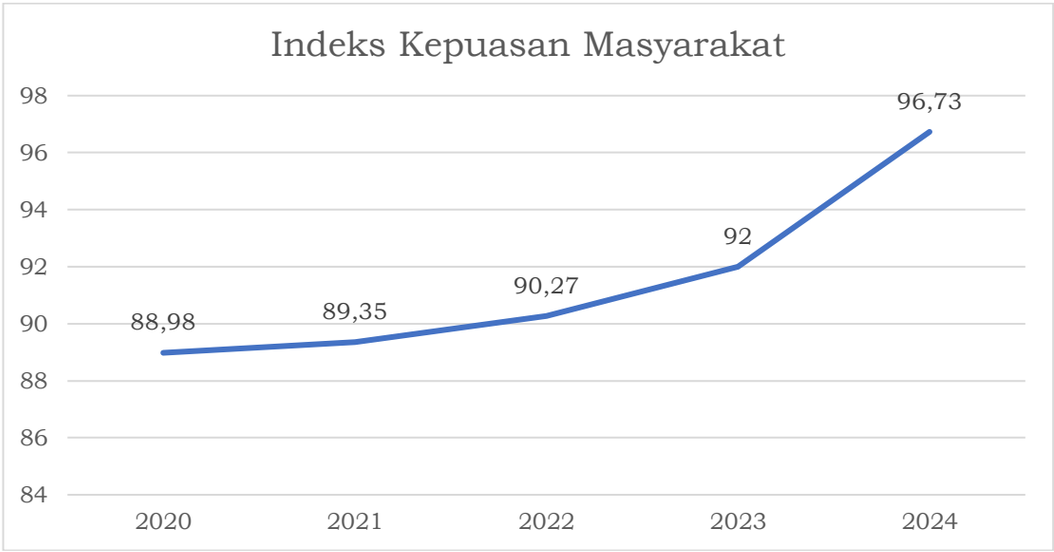

Gambar 2. 5 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pedurungan 2020-2024

Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pedurungan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dari 88,98 pada tahun 2020 menjadi 96,73 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang signifikan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, kemudahan prosedur, maupun sikap petugas dalam memberikan layanan. Capaian tahun 2024 yang mendekati angka sempurna menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan hasil dari komitmen aparatur Kecamatan Pedurungan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, inovasi layanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan juga mengindikasikan bahwa strategi pelayanan yang berbasis digital dan keterbukaan informasi berjalan efektif. Selain itu, pelibatan masyarakat melalui forum-forum konsultasi publik dan peningkatan kapasitas SDM turut memperkuat kepercayaan publik. Kesuksesan ini dapat menjadi dasar untuk memperluas cakupan pelayanan prima di tahun-tahun mendatang. Secara keseluruhan, capaian IKM ini menjadi indikator keberhasilan nyata reformasi birokrasi di tingkat kecamatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan data realisasi Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif sebagai berikut:

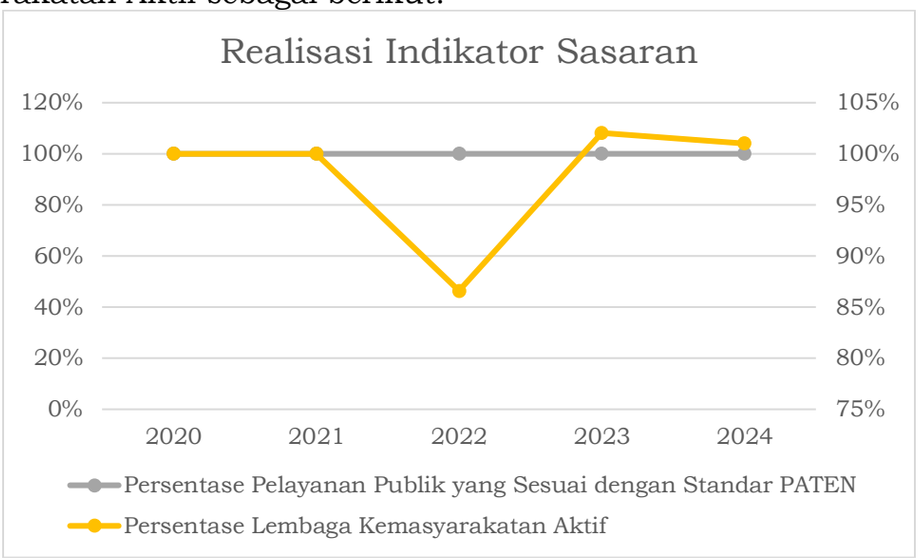

Gambar 2. 6 Realisasi Indikator Sasaran Kecamatan Pedurungan 2020-2024

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pedurungan

Hasil kinerja anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Pedurungan mencerminkan sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Selama periode pelaksanaan, anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan pelayanan, termasuk pengadaan sarana dan prasarana. Realisasi pendanaan ini juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Urusan Penunjang Kewilayahan		**N/A**	**39.982.131.615**	**56.331.044.754**	**62.330.338.205**	**63.119.985.773**	**N/A**	**35.653.255.263**	**54.323.392.510**	**61.133.590.473**	**61.592.664.969**	**0,00 %**	**89,17%**	**96,44%**	**98,08%**	**97,58%**	**55.440.875.087**	**53.175.725.804**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**N/A**	**19.690.280.549**	**19.358.077.652**	**19.137.529.942**	**20.238.309.349**	**N/A**	**16.852.851.888**	**18.266.181.656**	**18.439.449.228**	**19.280.670.837**	**0,00 %**	**85,59%**	**94,36%**	**96,35%**	**95,27%**	**19.606.049.373**	**18.209.788.402**
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		N/A	12.670.782	32.315.242	17.717.170	71.097.200	N/A	11.066.500	11.861.000	5.731.300	65.597.909	0,00 %	87,34%	36,70%	32,35%	92,27%	33.450.099	23.564.177
01.01	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	2.854.091	3.510.984	2.704.440	27.808.000	N/A	2.820.191	2.233.750	900.000	25.867.430	0,00 %	98,81%	63,62%	33,28%	93,02%	9.219.379	7.955.343
01.02	b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	2.007.691	5.947.575	4.449.180	3.921.900	N/A	1.963.791	2.815.500	592.500	3.400.860	0,00 %	97,81%	47,34%	13,32%	86,71%	4.081.587	2.193.163
01.03	c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	1.995.000	9.106.160	1.349.490	3.921.900	N/A	1.995.000	2.164.250	1.225.800	3.583.500	0,00 %	100,00%	23,77%	90,83%	91,37%	4.093.138	2.242.138
01.04	d	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	N/A	1.995.000	3.183.675	2.169.290	3.246.900	N/A	1.995.000	1.681.250	1.690.000	2.881.319	0,00 %	100,00%	52,81%	77,91%	88,74%	2.648.716	2.061.892
01.05	e	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	N/A	1.995.400	3.701.540	2.394.290	3.246.900	N/A	1.995.250	1.501.250	1.173.000	2.613.000	0,00 %	99,99%	40,56%	48,99%	80,48%	2.834.533	1.820.625
01.06	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	1.994.400	2.375.876	2.187.520	2.154.400	N/A	489,25	760000	0	1.973.760	0,00 %	0,02 %	31,99%	0,00 %	91,62%	2.178.049	683.562
01.07	g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	2.001.000	4.489.432	2.462.960	26.797.200	N/A	1.994.400	705.000	150.000	25.278.040	0,00 %	99,67%	15,70%	6,09 %	94,33%	8.937.648	7.031.860
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		N/A	15.577.448.298	15.373.688.677	16.877.063.409	18.378.547.266	N/A	14.291.913.209	14.722.030.201	16.363.034.558	17.524.059.230	0,00 %	91,75%	95,76%	96,95%	95,35%	16.551.686.913	15.725.259.300
02.01	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	14.971.927.734	14.769.144.972	16.304.364.831	17.805.679.000	N/A	13.844.385.245	14.154.780.201	15.796.921.558	16.952.520.170	0,00 %	92,47%	95,84%	96,89%	95,21%	15.962.779.134	15.187.151.794

KODEREK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02.02	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	600.658.782	597.380.000	565.784.418	565.732.266	N/A	442.743.982	561.400.000	563.220.000	564.547.000	0,00%	73,71%	93,98%	99,55%	99,79%	582.388.867	532.977.746
02.05	c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	2.854.091	1.220.996	947.760	981.000	N/A	2.820.191	1.052.000	375.000	919.400	0,00%	98,81%	86,16%	39,57%	93,72%	1.500.962	1.291.648
02.07	d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	0	4.417.000	4.769.920	5.324.000	N/A	0	3.848.000	2.443.000	5.288.800	0,00%	0,00%	87,12%	51,22%	99,34%	3.627.730	2.894.950
02.08	e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	2.007.691	1.525.709	1.196.480	831.000	N/A	1.963.791	950.000	75.000	783.860	0,00%	97,81%	62,27%	6,27%	94,33%	1.390.220	943.163
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		N/A	2.314.636.487	934.902.570	697.145.620	972.495.056	N/A	2.191.353.547	791.863.544	641.160.963	925.451.927	0,00%	94,67%	84,70%	91,97%	95,16%	1.229.794.933	1.137.457.495
06.01	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	22.773.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	N/A	22.679.300	23.926.159	24.840.690	24.480.717	0,00%	99,59%	95,70%	99,36%	97,92%	24.443.250	23.981.717
06.02	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	209.712.364	91.865.040	238.283.318	235.386.390	N/A	205.298.000	89.200.000	228.331.531	199.106.000	0,00%	97,90%	97,10%	95,82%	84,59%	193.811.778	180.483.883
06.04	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	45.416.100	60.388.000	51.842.640	45.000.000	N/A	25.532.406	53.849.500	46.526.305	44.539.850	0,00%	56,22%	89,17%	89,75%	98,98%	50.661.685	42.612.015
06.05	d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.759.000	35.103.000	30.000.000	12.701.851	17.415.000	16.759.000	11.506.550	22.293.000	7.223.350	17.413.720	100,00%	32,78%	74,31%	56,87%	99,99%	22.395.770	15.039.124
06.08	e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	105.587.203	122.500.000	118.491.000	217.029.117	N/A	73.769.200	68.659.885	113.276.890	215.516.200	0,00%	69,87%	56,05%	95,60%	99,30%	140.901.830	117.805.544
06.09	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	14.997.200	41.751.810	58.787.900	54.307.000	N/A	2.185.000	13.190.000	39.742.830	51.751.440	0,00%	14,57%	31,59%	67,60%	95,29%	42.460.978	26.717.318
06.11	g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	N/A	1.881.047.620	563.397.720	192.038.911	378.357.549	N/A	1.850.383.091	520.745.000	181.219.367	372.644.000	0,00%	98,37%	92,43%	94,37%	98,49%	753.710.450	731.247.865

KODEREK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Elektronik pada SKPD																	
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		N/A	139.814.000	880.702.634	345.978.672	103.114.699	N/A	135.850.000	813.337.000	305.433.000	95.700.000	0,00%	97,16%	92,35%	88,28%	92,81%	367.402.501	337.580.000
07.06	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	139.814.000	880.702.634	345.978.672	103.114.699	N/A	135.850.000	813.337.000	305.433.000	95.700.000	0,00%	97,16%	92,35%	88,28%	92,81%	367.402.501	337.580.000
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		N/A	182.970.401	339.619.000	423.141.770	402.894.128	N/A	117.245.340	209.976.557	374.946.620	361.600.361	0,00%	64,08%	61,83%	88,61%	89,75%	337.156.325	265.942.220
08.02	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.076.460	182.970.401	264.620.000	245.824.800	272.500.000	117.551.039	117.245.340	144.014.162	204.031.298	243.586.472	71,21%	64,08%	54,42%	83,00%	89,39%	226.198.332	165.285.662
08.03	b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	0	74.999.000	177.316.970	130.394.128	N/A	0	65.962.395	170.915.112	118.013.889	0,00%	0,00%	87,95%	96,39%	90,51%	95.677.525	88.722.849
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		N/A	1.515.910.000	1.796.849.529	776.483.301	310.161.000	N/A	1.112.339.289	1.717.113.354	749.142.997	308.261.410	0,00%	73,38%	95,56%	96,48%	99,39%	1.099.850.958	971.714.263
09.02	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	228.384.000	192.082.000	192.081.570	190.161.000	N/A	59.030.681	125.516.354	171.066.097	190.007.810	0,00%	25,85%	65,35%	89,06%	99,92%	200.677.143	136.405.236
09.09	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	485.997.388	505.010.363	304.440.000	20.087.140	20.000.000	485.997.388	418.805.000	299.254.000	17.436.400	19.034.600	100,00%	82,93%	98,30%	86,80%	95,17%	267.106.978	248.105.478
09.10	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.745.000	585.910.000	1.218.438.168	374.626.591	50.000.000	51.832.835	572.039.608	1.210.691.000	371.572.600	49.668.000	81,31%	97,63%	99,36%	99,18%	99,34%	458.543.952	451.160.809
09.11	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	31.705.000	148.298.000	81.889.361	189.688.000	50.000.000	31.705.000	62.464.000	81.652.000	189.067.900	49.551.000	100,00%	42,12%	99,71%	99,67%	99,10%	100.316.072	82.887.980

KODEREK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**N/A**	**1.958.289.605**	**3.131.685.109**	**4.009.555.940**	**3.981.786.214**	**N/A**	**1.786.630.452**	**2.874.588.822**	**3.828.664.521**	**3.758.874.308**	**0,00 %**	**91,23%**	**91,79%**	**95,49%**	**94,40%**	**3.270.329.217**	**3.062.189.526**
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		N/A	43.064.000	44.638.800	982.277.500	434.300.000	N/A	29.599.499	42.079.500	966.922.400	405.800.000	0,00 %	68,73%	94,27%	98,44%	93,44%	376.070.075	361.100.350
01.02	a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	43.064.000	44.638.800	982.277.500	434.300.000	N/A	29.599.499	42.079.500	966.922.400	405.800.000	0,00 %	68,73%	94,27%	98,44%	93,44%	376.070.075	361.100.350
02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		N/A	767.575.000	2.034.872.309	1.969.484.358	2.461.438.015	N/A	702.887.047	1.884.878.134	1.856.004.335	2.337.475.257	0,00 %	91,57%	92,63%	94,24%	94,96%	1.808.342.421	1.695.311.193
02.03	a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	N/A	767.575.000	1.147.758.124	1.222.074.778	1.340.487.755	N/A	702.887.047	1.083.541.991	1.144.453.694	1.292.880.201	0,00 %	91,57%	94,41%	93,65%	96,45%	1.119.473.914	1.055.940.733
02.03	b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	3.216.425.000	3.104.200.000	93.100.000	79.500.000	110.709.100	3.213.647.308	2.844.686.096	76.190.364	77.785.660	101.185.518	99,91%	91,64%	81,84%	97,84%	91,40%	1.320.786.820	1.262.698.989
02.03	c	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	3.724.246.496	3.580.838.159	89.035.740	81.500.000	105.381.840	3.705.036.635	3.277.716.577	84.510.885	75.018.450	104.721.660	99,48%	91,53%	94,92%	92,05%	99,37%	1.516.200.447	1.449.400.841

KODEREK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02.03	d	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	721.050.500	657.200.000	58.819.500	69.050.000	93.000.000	697.486.832	596.391.164	54.232.276	67.419.566	87.345.097	96,73%	90,75%	92,20%	97,64%	93,92%	319.824.000	300.574.987
02.03	e	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	1.437.831.000	1.337.929.257	80.000.000	59.000.000	89.054.580	1.426.340.867	1.224.620.375	77.640.205	55.503.178	88.534.596	99,20%	91,53%	97,05%	94,07%	99,42%	600.762.967	574.527.844
02.03	f	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	1.007.105.689	921.658.116	67.073.469	51.900.000	90.322.770	987.002.874	845.295.258	66.323.977	51.258.289	89.616.474	98,00%	91,71%	98,88%	98,76%	99,22%	427.612.009	407.899.374
02.03	g	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	1.493.399.700	1.415.742.294	62.584.836	38.500.000	89.163.660	1.484.851.663	1.280.121.792	50.748.851	32.238.190	68.708.676	99,43%	90,42%	81,09%	83,74%	77,06%	619.878.098	583.333.834
02.03	h	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	1.648.022.200	1.572.616.057	83.000.000	70.726.280	94.509.100	1.645.570.204	1.439.475.729	79.495.052	69.400.559	91.749.041	99,85%	91,53%	95,78%	98,13%	97,08%	693.774.727	665.138.117

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02.03	i	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	1.008.298.000	934.400.000	83.000.000	54.000.000	89.163.660	1.003.224.806	855.709.218	80.426.050	49.249.811	82.283.747	99,50%	91,58%	96,90%	91,20%	92,28%	433.772.332	414.178.726
02.03	j	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	1.406.883.000	1.325.000.000	63.887.000	68.000.000	93.000.000	1.398.739.854	1.210.690.200	55.814.804	66.865.861	87.171.345	99,42%	91,37%	87,36%	98,33%	93,73%	591.354.000	563.856.413
02.03	k	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	1.322.993.400	1.202.021.000	79.000.000	67.433.300	90.418.200	1.314.564.340	1.101.414.127	57.209.445	65.519.714	85.941.577	99,36%	91,63%	72,42%	97,16%	95,05%	552.373.180	524.929.841
02.03	l	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	1.185.185.000	1.085.600.000	69.000.000	55.800.000	90.418.200	1.182.236.681	997.272.177	61.131.153	50.454.201	88.805.966	99,75%	91,86%	88,60%	90,42%	98,22%	497.200.640	475.980.036
02.03	m	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	635.510.420	555.400.000	58.613.640	52.000.000	85.809.150	630.738.352	508.177.063	57.613.081	50.837.162	75.531.359	99,25%	91,50%	98,29%	97,76%	88,02%	277.466.642	264.579.403
02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		N/A	632.735.055	1.052.174.000	1.057.794.082	1.086.048.199	N/A	459.431.655	947.631.188	1.005.737.786	1.015.599.051	0,00%	72,61%	90,06%	95,08%	93,51%	957.187.834	857.099.920

KODEREK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04.03	a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	632.735.055	1.052.174.000	1.057.794.082	1.086.048.199	N/A	459.431.655	947.631.188	1.005.737.786	1.015.599.051	0,00%	72,61%	90,06%	95,08%	93,51%	957.187.834	857.099.920
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**N/A**	**17.008.663.221**	**33.746.120.993**	**39.139.493.523**	**38.840.690.210**	**N/A**	**16.273.436.711**	**33.142.762.033**	**38.841.476.724**	**38.497.519.824**	**0,00%**	**95,68%**	**98,21%**	**99,24%**	**99,12%**	**32.183.741.987**	**31.688.798.823**
02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		N/A	15.756.629.707	32.420.681.309	16.568.083.517	1.746.200.000	N/A	15.648.340.266	31.849.727.569	16.360.682.310	15.018.986.314	0,00%	99,31%	98,24%	98,75%	860,10%	16.622.898.633	19.719.434.115
02.01	a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A	17.645.000	65.650.000	42.214.800	50.000.000	N/A	17.539.200	58.682.500	39.941.500	42.306.500	0,00%	99,40%	89,39%	94,61%	84,61%	43.877.450	39.617.425
02.02	b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Pedurungan)	N/A	6.001.476.530	2.484.413.115	1.661.994.800	950.000.000	N/A	5.959.082.911	2.477.306.000	1.645.979.400	937.270.377	0,00%	99,29%	99,71%	99,04%	98,66%	2.774.471.111	2.754.909.672
02.02	c	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo kidul)	353.000.000	418.397.322	1.168.610.000	1.598.850.000	1.696.200.000	352.692.000	411.370.000	1.166.044.000	1.591.670.500	1.681.559.925	99,91%	98,32%	99,78%	99,55%	99,14%	1.047.011.464	1.040.667.285
02.02	d	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	353.000.000	680.553.000	1.402.800.000	1.539.000.000	1.671.400.000	353.000.000	676.138.000	1.398.862.000	1.519.663.800	1.648.829.030	100,00%	99,35%	99,72%	98,74%	98,65%	1.129.350.600	1.119.298.566
02.02	e	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	438.800.000	943.044.190	834.757.684	902.500.000	941.000.000	515.186.000	940.407.000	830.056.000	897.954.500	923.492.017	117,41%	99,72%	99,44%	99,50%	98,14%	812.020.375	821.419.103
02.02	f	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	353.000.000	989.666.227	453.909.482	902.500.000	1.075.600.000	352.708.000	986.495.000	449.149.000	896.489.000	1.053.807.057	99,92%	99,68%	98,95%	99,33%	97,97%	754.935.142	747.729.611

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		(Kelurahan Tlogomulyo)																	
02.02	g	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	366.000.000	688.540.000	705.666.003	902.500.000	944.600.000	365.932.795	691.422.155	701.554.860	894.408.620	934.514.113	99,98%	100,42%	99,42%	99,10%	98,93%	721.461.201	717.566.509
02.02	h	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	353.000.000	932.574.900	479.760.476	929.510.000	1.022.400.000	353.000.000	920.818.000	473.387.000	925.397.000	1.007.913.772	100,00%	98,74%	98,67%	99,56%	98,58%	743.449.075	736.103.154
02.02	i	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	353.000.000	737.964.332	560.959.489	902.500.000	939.800.000	353.000.000	728.556.000	557.324.600	897.912.000	924.201.097	100,00%	98,73%	99,35%	99,49%	98,34%	698.844.764	692.198.739
02.02	j	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	353.000.000	750.871.533	766.280.122	902.500.000	942.800.000	353.000.000	743.092.000	761.863.600	897.989.700	919.203.777	100,00%	98,96%	99,42%	99,50%	97,50%	743.090.331	735.029.815
02.02	k	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gemah)	353.000.000	1.041.828.648	588.680.000	1.028.850.000	1.074.000.000	352.741.100	1.032.468.000	586.571.000	1.015.010.300	1.061.141.340	99,93%	99,10%	99,64%	98,65%	98,80%	817.271.730	809.586.348
02.02	l	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Palebon)	353.000.000	811.047.498	507.780.476	908.278.192	1.075.600.000	352.294.000	808.504.000	504.464.040	905.404.300	1.062.345.700	99,80%	99,69%	99,35%	99,68%	98,77%	731.141.233	726.602.408
02.02	m	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	353.000.000	790.940.000	586.482.730	902.500.000	988.600.000	353.000.000	787.601.000	580.423.000	898.712.600	981.605.843	100,00%	99,58%	98,97%	99,58%	99,29%	724.304.546	720.268.489

KODEREK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02.02	n	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	391.000.000	952.080.527	684.814.876	902.500.000	946.200.000	391.000.000	944.847.000	680.220.000	896.617.000	936.326.906	100,00%	99,24%	99,33%	99,35%	98,96%	775.319.081	769.802.181
02.03	o	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	143.931.514	942.664.310	381.235.611	394.040.210	N/A	125.200.995	541.602.065	335.283.600	327.110.550	0,00%	86,99%	57,45%	87,95%	83,01%	465.467.911	332.299.303
02.03	p	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	N/A	3.827.097.322	3.334.391.580	110.318.440	50.000.000	N/A	3.533.225.846	3.319.365.550	110.009.200	49.989.800	0,00%	92,32%	99,55%	99,72%	99,98%	1.830.451.836	1.753.147.599
02.03	q	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	N/A	4.562.246.202	3.828.954.900	91.219.000	50.000.000	N/A	4.211.261.427	3.822.838.730	90.895.500	50.000.000	0,00%	92,31%	99,84%	99,65%	100,00%	2.133.105.026	2.043.748.914
02.03	r	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	N/A	1.822.530.990	763.218.756	76.675.000	50.000.000	N/A	1.705.549.664	759.162.850	75.175.000	49.980.000	0,00%	93,58%	99,47%	98,04%	99,96%	678.106.187	647.466.879
02.03	s	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	N/A	2.562.993.328	1.555.625.000	97.082.680	50.000.000	N/A	2.422.960.625	1.553.657.930	97.040.430	48.835.100	0,00%	94,54%	99,87%	99,96%	97,67%	1.066.425.252	1.030.623.521
02.03	t	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	N/A	1.760.168.508	1.144.600.000	102.911.420	50.000.000	N/A	1.851.904.234	1.144.098.350	102.411.710	48.475.000	0,00%	105,21%	99,96%	99,51%	96,95%	764.419.982	786.722.324
02.03	u	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	N/A	2.587.241.769	1.644.400.000	100.934.880	50.000.000	N/A	2.387.768.347	1.589.144.404	83.094.400	41.953.100	0,00%	92,29%	96,64%	82,32%	83,91%	1.095.644.162	1.025.490.063
02.03	v	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	N/A	2.563.089.989	1.816.600.000	93.973.720	47.200.000	N/A	2.409.649.520	1.813.350.000	90.867.390	46.198.950	0,00%	94,01%	99,82%	96,69%	97,88%	1.130.215.927	1.090.016.465

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02.03	w	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	N/A	1.902.325.771	1.137.480.000	100.900.000	50.000.000	N/A	1.802.944.318	1.137.477.860	100.039.200	49.991.000	0,00%	94,78%	100,00%	99,15%	99,98%	797.676.443	772.613.095
02.03	x	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	N/A	2.617.593.648	1.538.400.000	99.700.000	50.000.000	N/A	2.469.075.100	1.536.135.220	96.819.800	48.960.600	0,00%	94,33%	99,85%	97,11%	97,92%	1.076.423.412	1.037.747.680
02.03	y	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	N/A	2.253.608.498	1.421.800.000	94.873.170	50.000.000	N/A	2.144.149.523	1.412.610.870	94.122.700	46.920.680	0,00%	95,14%	99,35%	99,21%	93,84%	955.070.417	924.450.943
02.03	z	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	N/A	2.116.454.936	1.252.032.310	98.693.970	50.000.000	N/A	2.012.466.577	1.245.769.000	84.360.000	49.450.680	0,00%	95,09%	99,50%	85,48%	98,90%	879.295.304	848.011.564
02.03	aa	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	N/A	1.716.504.163	749.950.000	114.538.650	50.000.000	N/A	1.647.345.113	748.607.140	112.493.660	48.603.400	0,00%	95,97%	99,82%	98,21%	97,21%	657.748.203	639.262.328
02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		N/A	1.108.102.000	196.850.200	23.051.589.261	23.531.250.000	N/A	499.895.450	139.271.839	22.868.287.639	23.478.533.510	0,00%	45,11%	70,75%	99,20%	99,78%	11.971.947.865	11.746.497.110
03.01	a	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	N/A	99.000.000	136.614.200	137.000.000	127.000.000	N/A	58.275.450	121.586.840	110.942.484	112.325.500	0,00%	58,86%	89,00%	80,98%	88,45%	124.903.550	100.782.569
03.01	b	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	N/A	0	0	4.005.061.930	4.002.800.000	N/A	0	0	4.005.054.700	4.002.721.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	2.001.965.483	2.001.943.925
03.01	c	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	N/A	0	0	4.579.247.100	4.561.400.000	N/A	0	0	4.559.983.000	4.561.384.500	0,00%	0,00%	0,00%	99,58%	100,00%	2.285.161.775	2.280.341.875
03.01	d	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	N/A	0	0	931.450.000	908.000.000	N/A	0	0	917.275.000	903.200.000	0,00%	0,00%	0,00%	98,48%	99,47%	459.862.500	455.118.750

KODEREK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03.01	e	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tlogomulyo)	N/A	0	0	1.801.529.130	1.866.200.000	N/A	0	0	1.795.364.130	1.864.359.610	0,00%	0,00%	0,00%	99,66%	99,90%	916.932.283	914.930.935
03.01	f	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalicari)	N/A	0	0	1.239.370.670	1.229.600.000	N/A	0	0	1.239.253.760	1.229.176.500	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,97%	617.242.668	617.107.565
03.01	g	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Plamongansari)	N/A	0	0	1.855.147.140	1.843.400.000	N/A	0	0	1.845.628.200	1.839.416.000	0,00%	0,00%	0,00%	99,49%	99,78%	924.636.785	921.261.050
03.01	h	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	N/A	0	0	2.080.025.000	2.073.200.000	N/A	0	0	2.076.938.130	2.072.193.120	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	99,95%	1.038.306.250	1.037.282.813
03.01	i	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	N/A	0	0	1.339.069.200	1.331.600.000	N/A	0	0	1.339.015.840	1.331.548.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	667.667.300	667.640.960
03.01	j	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gemah)	N/A	0	0	1.724.932.020	1.717.400.000	N/A	0	0	1.719.521.710	1.712.764.570	0,00%	0,00%	0,00%	99,69%	99,73%	860.583.005	858.071.570
03.01	k	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Palebon)	N/A	0	0	1.581.596.430	1.572.800.000	N/A	0	0	1.570.468.340	1.564.538.600	0,00%	0,00%	0,00%	99,30%	99,47%	788.599.108	783.751.735
03.01	l	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	N/A	0	0	1.501.453.740	1.487.600.000	N/A	0	0	1.497.087.400	1.485.803.610	0,00%	0,00%	0,00%	99,71%	99,88%	747.263.435	745.722.753
03.01	m	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	N/A	0	0	769.706.830	787.400.000	N/A	0	0	765.431.220	783.600.500	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	99,52%	389.276.708	387.257.930

KODEREK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03.04	B	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A	0	0	4.650.000	22.850.000	N/A	0	0	3.750.000	15.502.000	0,00%	0,00%	0,00%	80,65%	67,84%	6.875.000	4.813.000
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**N/A**	**1.009.102.000**	**60.236.000**	**31.983.800**	**33.750.000**	**N/A**	**441.620.000**	**17.684.999**	**13.500.000**	**33.750.000**	**0,00%**	**43,76%**	**29,36%**	**42,21%**	**100,00%**	**283.767.950**	**126.638.750**
02.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		N/A	315.796.240	34.925.000	31.983.800	33.750.000	N/A	298.716.212	22.175.000	13.500.000	33.750.000	0,00%	94,59%	63,49%	42,21%	100,00%	104.113.760	92.035.303
03.01	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	N/A	315.796.240	34.925.000	31.983.800	33.750.000	N/A	298.716.212	22.175.000	13.500.000	33.750.000	0,00%	94,59%	63,49%	42,21%	100,00%	104.113.760	92.035.303
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**N/A**	**315.796.240**	**34.925.000**	**11.775.000**	**25.450.000**	**N/A**	**298.716.212**	**22.175.000**	**10.500.000**	**21.850.000**	**0,00%**	**94,59%**	**63,49%**	**89,17%**	**85,85%**	**96.986.560**	**88.310.303**
02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		N/A	0	25.183.819	11.775.000	25.450.000	N/A	0	10.006.000	10.500.000	21.850.000	0,00%	0,00%	39,73%	89,17%	85,85%	15.602.205	10.589.000
01.02	a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A	0	25.183.819	11.775.000	25.450.000	N/A	0	10.006.000	10.500.000	21.850.000	0,00%	0,00%	39,73%	89,17%	85,85%	15.602.205	10.589.000

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pedurungan dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Kota Semarang antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Pedurungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Pedurungan.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel di Kecamatan Pedurungan.
3. Potensi terjadinya konflik sosial, gangguan keamanan, serta ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pedurungan.
4. Rendahnya kesiapan sebagian masyarakat Kecamatan Pedurungan dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasis elektronik atau digital.

Dengan tantangan-tantangan ini, Kecamatan Pedurungan perlu melakukan upaya strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks di masa mendatang.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Pedurungan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Meningkatnya peran Kecamatan Pedurungan beserta kelurahan-kelurahan di dalamnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya urusan yang tidak ditangani oleh perangkat daerah lainnya.
2. Terwujudnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui digitalisasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi di Kecamatan Pedurungan.
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat Kecamatan Pedurungan dalam mendukung pembangunan, mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik.

Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan, yang menjadi modal sosial penting untuk keberhasilan pelaksanaan Renstra.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas mengenai tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait permasalahan yang sedang terjadi di wilayah Kecamatan Pedurungan. Dari hasil rumusan permasalahan tersebut, selanjutnya dapat ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pedurungan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam proses perumusan permasalahan dan isu strategis, dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pedurungan, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah, serta kajian lingkungan hidup strategis. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk menghasilkan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diperoleh dengan memperhatikan capaian kinerja saat ini serta berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Rancangan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Semarang adalah "Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan." Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam dua pokok permasalahan, dimana Kecamatan Pedurungan memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan kedua, yakni "Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan."

Dari pokok permasalahan tersebut, terdapat tiga akar permasalahan, yaitu:

a. Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
b. Akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih perlu ditingkatkan.
c. Inovasi dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Dari ketiga akar permasalahan tersebut, yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Pedurungan adalah "Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik masih perlu ditingkatkan."

Selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2020–2024) serta hasil telaahan terhadap permasalahan pembangunan Kota Semarang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif

   Data capaian menunjukkan bahwa *Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif* di Kecamatan Pedurungan pada periode 2020–2024 masih mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 80,00%, meningkat menjadi 95,00% pada Tahun 2021, namun menurun kembali menjadi 84,00% pada Tahun 2022, dan kemudian mencapai kondisi optimal yaitu 100,00% pada Tahun 2023 dan Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pada akhir periode capaian sudah optimal, namun masih terdapat dinamika yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan agar keberlanjutan capaian dapat terjaga.

   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar masalahnya, yaitu belum konsistennya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pedurungan.

b. Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

   Berdasarkan data capaian, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan Pedurungan juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2021 capaian sebesar 87,00%, menurun signifikan menjadi 58,00% pada Tahun 2022, namun meningkat tajam hingga 100,00% pada Tahun 2023 dan Tahun 2024.

   Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya kendala dalam konsistensi pelaksanaan pembinaan, baik dari sisi koordinasi lintas sektor maupun keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor, serta mendorong peran organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan.

Dari permasalahan ini dapat diidentifikasi akar masalahnya, yaitu belum optimalnya kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif organisasi masyarakat dalam mendukung pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Pedurungan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang, maka Kecamatan Pedurungan memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kewilayahan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap capaian kinerja serta analisis gambaran umum Kecamatan Pedurungan, dapat dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Pedurungan;
b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Pedurungan;
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pedurungan.

Dari rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang kemudian dijabarkan dalam akar masalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan Pedurungan;
b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Pedurungan;
c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan keuangan Kecamatan Pedurungan;
d. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Pedurungan;
e. Belum optimalnya fungsi koordinasi penanganan masalah sosial dengan instansi terkait;
f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Pedurungan;
g. Belum optimalnya pelayanan kebersihan di wilayah Kecamatan Pedurungan;
h. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan Pedurungan;
i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan di Kecamatan Pedurungan;
j. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pedurungan;
k. Belum optimalnya kualitas ide dan gagasan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pedurungan;
l. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Pedurungan;
m. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pedurungan.

Rumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang kemudian dijabarkan dalam akar masalah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rumusan Permasalahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Permasalahan Utama	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Pedurungan	- Belum Optimalnya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kecamatan Pedurungan
		- Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Pedurungan
		- Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Kecamatan Pedurungan
2	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Pedurungan	- Belum Optimalnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Kecamatan Pedurungan
		- Belum Optimalnya Fungsi Koordinasi Masalah Sosial Dengan Instansi Terkait
		- Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pedurungan
		- Belum Optimalnya Pelayanan Kebersihan Kecamatan Pedurungan
		- Belum Optimalnya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Umum Masyarakat Kecamatan Pedurungan
		- Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Wawasan Kebangsaan Kecamatan Pedurungan
3	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pedurungan	- Belum Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pedurungan
		- Belum Optimalnya Kualitas Ide/Gagasan Masyarakat Dalam Musrenbang Kecamatan Pedurungan
		- Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan
		- Belum Optimalnya Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pedurungan

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan Pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan daerah beserta program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Misi 1 Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi pembangunan sekolah di daerah tertinggal, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta penerapan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi sejak dini. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri agar lulusan siap kerja dan berdaya saing. Di sektor sosial, penguatan dilakukan melalui program bantuan tunai bersyarat, rumah singgah, dan pendampingan kelompok marginal seperti difabel dan lansia. Selain itu, masyarakat didorong untuk aktif dalam kegiatan budaya yang menumbuhkan semangat kebhinekaan, sehingga kesejahteraan sosial berjalan beriringan dengan pembentukan karakter berbudaya.

Dalam konteks kerukunan beragama, Kecamatan Pedurungan menempatkan toleransi dan harmoni sosial sebagai bagian penting dari pembangunan manusia yang berkepribadian. Upaya menjaga kerukunan tersebut dipadukan dalam penguatan Indeks Harmoni Sosial, yang menjadi tolok ukur kohesi dan toleransi masyarakat lintas agama, etnis, serta golongan. Melalui fasilitasi dialog antarumat beragama, peran FKUB, kegiatan keagamaan lintas umat, hingga penguatan peran RT/RW dan tokoh masyarakat, diharapkan lahir lingkungan yang aman, rukun, dan saling menghargai. Dengan demikian, pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial tidak hanya mencetak masyarakat yang produktif dan sejahtera, tetapi juga membangun fondasi sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Lebih jauh, pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) juga menjadi bagian penting dalam mendukung misi ini. GDPK menekankan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan keluarga yang berdaya, serta tertib administrasi kependudukan. Bagi Kecamatan Pedurungan, hal ini diimplementasikan melalui optimalisasi pelayanan administrasi

kependudukan di tingkat kelurahan, edukasi keluarga berencana, dan penguatan ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan manusia. Dengan demikian, integrasi GDPK dalam Renstra Kecamatan Pedurungan bukan hanya menjawab isu kependudukan, tetapi juga memperkuat pencapaian misi Wali Kota Semarang dalam membangun masyarakat yang berpendidikan, sehat, produktif, dan berkepribadian..

Pada misi 1 ini terdapat 33 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 16 kegiatan prioritas.

Misi 2 Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi *telemedicine* untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Pada misi 2 ini terdapat 12 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 11 kegiatan prioritas.

Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Distribusi sembako murah diperluas dengan sistem yang transparan, sementara di sektor perumahan difokuskan pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Kota Semarang berupaya memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak sebagai fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, isu stunting menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada kualitas hidup dan masa depan generasi muda. Stunting tidak hanya terkait dengan ketersediaan pangan, tetapi juga pola asuh, kesehatan ibu dan anak, serta kondisi lingkungan. Di Kecamatan Pedurungan, percepatan penurunan stunting ditempuh melalui penguatan posyandu, pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi gizi seimbang kepada keluarga, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Kolaborasi lintas sektor dengan puskesmas,

PKK, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memastikan intervensi berjalan efektif, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sesuai arah pembangunan Kota Semarang yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam mendukung upaya tersebut, Posyandu menjadi instrumen penting dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, khususnya pada enam layanan dasar: kesehatan ibu, kesehatan anak, imunisasi, gizi, penanggulangan penyakit, dan kesehatan lingkungan. Di Kecamatan Pedurungan, Posyandu berperan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis komunitas. Namun, tantangan yang masih dihadapi antara lain belum meratanya kualitas dan kapasitas kader, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah kelurahan. Oleh karena itu, penguatan diperlukan melalui peningkatan kapasitas kader, integrasi data kesehatan berbasis aplikasi (SPBE), serta koordinasi lintas sektor dengan puskesmas, PKK, dan organisasi kemasyarakatan.

Dengan penguatan peran Posyandu 6 SPM, Kecamatan Pedurungan dapat memastikan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting, peningkatan gizi seimbang, serta terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang di wilayah ini.Pada misi 3 ini terdapat 24 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 13 kegiatan prioritas.

Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sejalan dengan arah pembangunan pada misi keempat, konsep Kota Layak Anak (KLA) menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Kota Layak Anak menempatkan pemenuhan hak anak sebagai prioritas, mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga partisipasi dalam pembangunan. Di Kecamatan Pedurungan, upaya mendukung KLA diwujudkan melalui penguatan peran keluarga, penyediaan ruang publik ramah anak, pengendalian isu pekerja

anak, serta integrasi layanan dasar melalui sekolah, posyandu, dan lembaga kemasyarakatan. Dengan penerapan KLA, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga menjamin tumbuh kembang generasi muda yang sehat, cerdas, dan terlindungi, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pada misi 4 ini terdapat 27 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 12 kegiatan prioritas.

Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.
Pada misi 5 ini terdapat 12 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 8 kegiatan prioritas.

Misi 6 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.
Pada misi 6 ini terdapat 30 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 26 kegiatan prioritas.

Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Sebagai bagian dari misi ketujuh, penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif. PUG dan ARG diarahkan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memperhatikan kebutuhan serta kepentingan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Melalui pendekatan ini, Kecamatan Pedurungan dapat memastikan distribusi manfaat pembangunan lebih merata, sekaligus meningkatkan efektivitas layanan publik yang responsif terhadap keberagaman masyarakat.

Pada misi 7 ini terdapat 25 program prioritas, dimana program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 13 kegiatan prioritas.

Terkait hal tersebut diatas, terdapat beberapa program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan, yaitu tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Program dan Kegiatan Prioritas dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Yang Terkait Langsung dan Tidak Langsung sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Misi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
Misi 1 Mewujudkan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Toleran dan Berbudaya dalam Semangat Kebhinekaan, serta Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian	- Penambahan Zona Aktivitas Gratis Untuk Masyarakat	- Penyiapan support system untuk kompetisi olahraga dan seni, serta inovator muda.
	- Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	
Misi 2 Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat yang Berfokus pada Kebutuhan Individu dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi	- Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran AlQuran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan	- Dukungan terhadap pendirian rumah inspirasi bagi kelompok disabilitas di tingkat kecamatan
	- Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem	- Penambahan zona aktivitas gratis untuk masyarakat

Misi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	keamanan lingkungan (siskamling)	
Misi 3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, dan papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak	- Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW	- Pemberdayaan masyarakat (bank sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST).
Misi 6 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat	- Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST)	
Misi 7 Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.	- Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan)	- Tambahan operasional RT dan RW. - Tambahan bantuan LPMK
	- Membangun sistem pemerintahan yang fleksibel, gesit, dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat	- Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal (meliputi seluruh sikluskehidupan).
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	- Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi.
	- Pengembangan Musrenbang Tematik	
	- Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil	
	- Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi	
	- Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK	

Pada tahap perencanaan selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang telah ditetapkan sejumlah 7 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dan dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 19 sasaran pembangunan daerah dengan 23 indikator sasaran. Juga telah ditetapkan 7 strategi dan 46 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Pedurungan mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu : **“Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola**

Pemerintahan yang baik dan Inklusif" dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu **"Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas."**

Dalam mewujudkan Misi 7 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemeritahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat" (Tujuan ke-7 RPJMD), dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" (Indikator Tujuan ke-8 RPJMD). Pada tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana secara khusus Kecamatan Pedurungan mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat" (Sasaran ke-18 RPJMD), dengan indikator sasaran "Indeks Pelayanan Publik" (Indikator Sasaran ke-22 RPJMD) dan sasaran berikutnya adalah "meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang" (Sasaran ke-19 RPJMD), yang diukur melalui indikator "persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan" (Indikator Sasaran ke-23).

Kemudian, dalam perwujudan sasaran pembangunan tersebut di atas juga telah ditetapkan 1 strategi, yaitu "Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah" (Strategi ke-7 RPJMD), dimana secara khusus Kecamatan Pedurungan secara khusus mendukung 3 arah kebijakan, yaitu Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi; Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan; Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Secara lengkap peranan Kecamatan Pedurungan dalam mendukung pencapaian visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta tujuan, sasaran dan strategi tersaji pada gambar berikut :

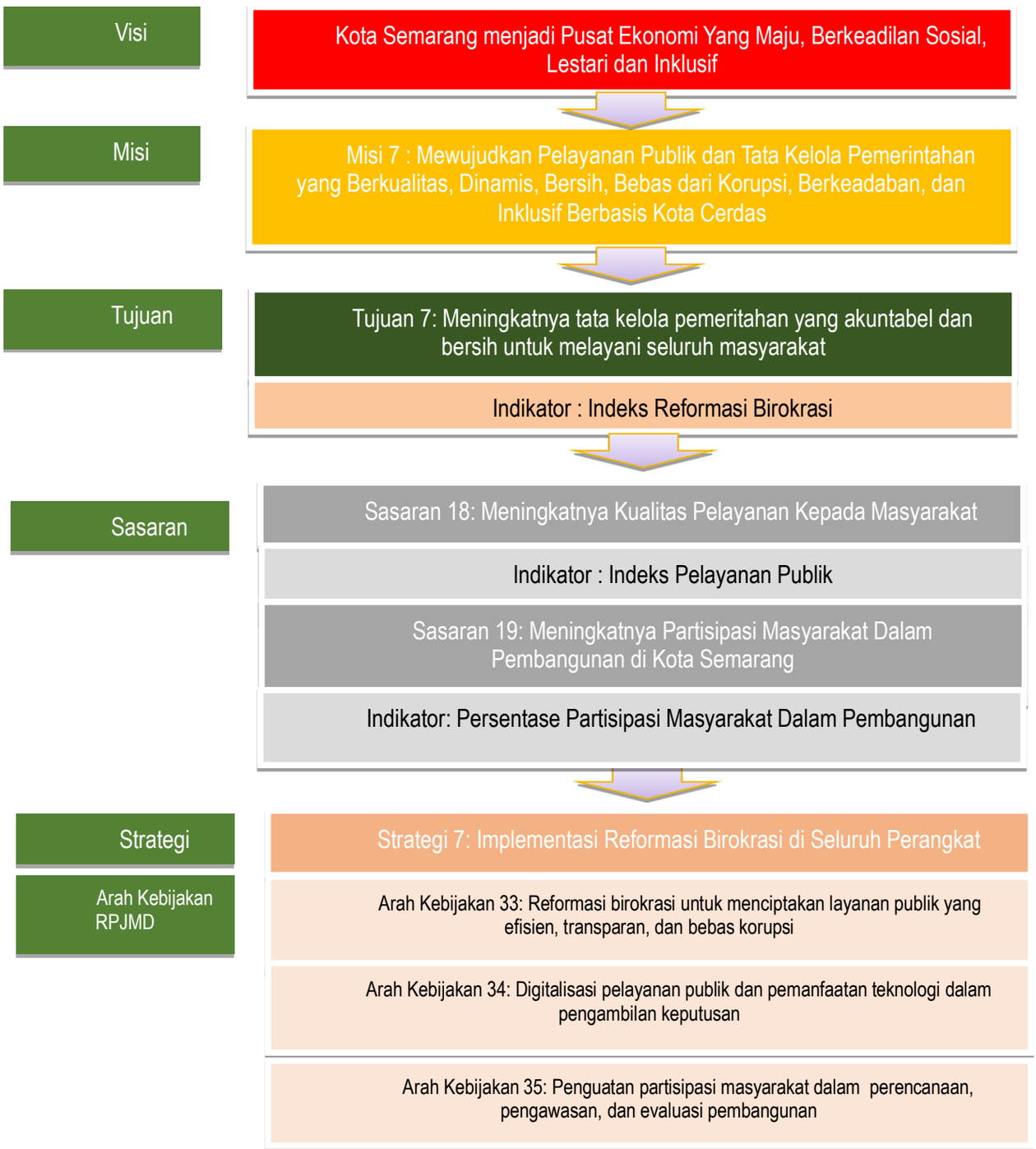

Gambar 2. 7 Peranan Kecamatan Pedurungan dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029

c. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga Dan Renstra Provinsi

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Pedurungan juga mendukung pelaksanaan Program Kecamatan Berdaya yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Program ini menempatkan kecamatan sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada penguatan kapasitas warga, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penyediaan ruang kreatif dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

Kecamatan Pedurungan telah ditetapkan sebagai bagian dari implementasi Kecamatan Berdaya, yang secara nyata diwujudkan melalui penyediaan layanan berbasis masyarakat, pendampingan ekonomi produktif, serta penguatan

lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, Kecamatan Pedurungan berkomitmen untuk menjadikan Kecamatan Berdaya sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus memperkuat posisi kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, rencana struktur ruang meliputi:

1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)
   - Rencana Penetapan Pusat Pelayanan
2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan, yaitu meliputi:
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
   - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
   - Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perkotaan Lainnya.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Pedurungan sebagai bagian dari BWK V dengan pengembangan fungsi utama meliputi perdagangan dan jasa; dan jasa pertemuan dan pameran.

Sedangkan rencana penetapan pusat pelayanan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota, berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Pedurungan meliputi Kelurahan Palebon, Kelurahan Gemah, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Pedurungan Tengah, dan Kelurahan Pedurungan Lor;
3. Pusat Lingkungan, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di Kecamatan Pedurungan yaitu:
   a. Pusat lingkungan 1 terdapat di Kelurahan Tlogosari Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Muktiharjo Kidul;
   b. Pusat lingkungan 2 terdapat di Kelurahan Palebon dengan daerah pelayanan Kelurahan Kalicari dan Kelurahan Gemah; dan

c. Pusat lingkungan 3 terdapat di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan daerah pelayanan Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Tlogomulyo, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Plamongansari dan Kelurahan Penggaron Kidul.

Rencana pengembangan sistem transportasi di Kota Semarang juga mencakup pengembangan moda kereta api perkotaan berbasis *monorail*. Jalur *monorail* ini direncanakan akan menghubungkan wilayah Sub Pusat Pelayanan BWK X, Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan BWK V, hingga Sub Pusat Pelayanan BWK IV. Dalam rencana ini, Kecamatan Pedurungan yang termasuk dalam wilayah BWK V akan menjadi salah satu titik strategis yang dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian *monorail*, sehingga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Kota Semarang.

Selain itu, Rencana pengembangan jaringan listrik di Kota Semarang juga mencakup wilayah Kecamatan Pedurungan sebagai bagian dari upaya peningkatan keandalan pasokan energi listrik. Di wilayah ini, pengembangan meliputi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang terhubung dengan sistem kelistrikan perkotaan. Beberapa jalur utama yang berada di Kecamatan Pedurungan direncanakan untuk ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, antara lain SUTT yang melalui Jalan Brigjend. Sudiarto, Jalan Pedurungan Tengah – Jalan Banjardowo Raya, serta Jalan Muktiharjo Raya.

Selanjutnya, Pengembangan sistem telekomunikasi jaringan kabel di Kecamatan Pedurungan mencakup peningkatan jaringan primer pada jalur Jalan Brigjend. Sudiarto dan Jalan Majapahit, serta jaringan sekunder pada jalur Jalan Tlogosari – Jalan Supriyadi – Jalan Brigjend. Sudiarto dan Jalan Pedurungan Kidul – Jalan Ketileng Raya. Selain itu, pengembangan Stasiun Telepon Otomatis (STO) dan jaringan serat optik dilakukan di seluruh kecamatan se Kota Semarang.

2.2.3 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Semarang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia, serta keberlangsungan ekosistem lainnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Pedurungan, permasalahan lingkungan pun menjadi semakin kompleks.

Atas dasar hal tersebut, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan yang selalu berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan di wilayah pelayanan Kecamatan Pedurungan, serta memastikan keselarasan dengan dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang.

KLHS merupakan dokumen yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan memuat integrasi aspek lingkungan, guna menjamin bahwa dimensi keberlanjutan telah diperhitungkan dalam setiap tahapan pembangunan Kota Semarang. Adapun isu strategis terkait muatan lingkungan hidup yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan;
2. Distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender yang belum merata;
3. Kontribusi sektor ekonomi unggulan yang masih perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan ekonomi daerah;

4. Meningkatnya ancaman risiko bencana dan kerentanan akibat perubahan iklim;
5. Ancaman penurunan kualitas serta distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
6. Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan Kota Semarang yang berkelanjutan;
7. Pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan akuntabel.

Berdasarkan fokus pemerintah daerah tersebut, isu strategis **KLHS Kota Semarang** terbagi dalam empat pilar, yaitu: (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; dan (4) Tata Kelola Kelembagaan. Dari keempat pilar tersebut, yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi **Kecamatan Pedurungan** adalah **pilar keempat (Tata Kelola Kelembagaan)**, dengan permasalahan strategis "**Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**" serta isu strategis "**Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab**", sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 11 Tema isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Pilar	Masalah Strategis	Isu Strategis
Tata Kelola Kelembagaan	Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, bertanggung jawab

2.2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Pedurungan

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis adalah peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang. Apabila pemerintah daerah mampu memprioritaskan dan membaca peluang serta tantangan tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan lebih mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal memanfaatkannya, pencapaian tujuan pembangunan akan menjadi semakin sulit.

Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dilakukan telaahan terhadap isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029, dimana terdapat tujuh isu strategis, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia;
2. Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas;
3. Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat;
4. Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas;
5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat;
6. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; dan

7. Penyelenggaraan *Good Governance.*

Dari ketujuh isu strategis tersebut, yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan adalah isu strategis ketujuh, yaitu Penyelenggaraan Good Governance. Dalam hal ini, perhatian utama diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga 100% sebagai indikator bahwa kondisi ideal pelayanan publik telah terwujud di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pedurungan, analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan, keselarasan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta keterkaitannya dengan isu strategis Kota Semarang, maka dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk Renstra Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Isu Perangkat Daerah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	**Permasalahan PD**	**Isu KLHS yang Relevan dengan PD**	**Target**			**Isu Startegis PD**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Pelayanan publik di tingkat kecamatan	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan dan sarana prasarana pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah lingkungan dan inklusif	Tuntutan pelayanan publik yang cepat dan berbasis teknologi	Kebijakan peningkatan SPM	Tuntutan pelayanan publik terintegrasi antar wilayah	Penyelenggaraan *Good Governance*
Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	Belum optimalnya kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pedurungan	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan ekonomi lokal	Tren pemberdayaan masyarakat dan ekonomi hijau	Program pemberdayaan dan UMKM	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Administrasi pemerintahan	Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Digitalisasi pemerintahan	Reformasi birokrasi	Integrasi data dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif
Pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pengelolaan perekonomian masyarakat dan program kesejahteraan sosial	Peningkatan akses dan pemerataan ekonomi berkelanjutan	Persaingan ekonomi global	Program pengentasan kemiskinan	Penguatan ekonomi lokal	Peningkatan kesejahteraan sosial
Ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Keamanan dan ketertiban berbasis partisipasi	Penanganan gangguan ketertiban umum	Penegakan peraturan daerah	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (2), visi dan misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang wajib berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam konteks Kecamatan Pedurungan, penyusunan Renstra ini merupakan penjabaran RPJMD Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi kecamatan. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan secara strategis untuk menentukan prioritas tertinggi pembangunan jangka menengah di wilayah, sekaligus menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan sasaran adalah kondisi terukur yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan melalui outcome dari program dan kegiatan.

Proses penetapan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pedurungan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, sehingga selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Penetapan ini juga merupakan jawaban atas hasil perumusan isu strategis Kecamatan Pedurungan, yang telah disusun melalui telaahan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Hasil telaahan tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pedurungan mendukung arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang, khususnya dalam:

1. Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi;
2. Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan;
3. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Dari hasil perumusan isu strategis Kecamatan Pedurungan, prioritas utama adalah "**peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel"**, yang dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025–2029, yaitu "**Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif**", Kecamatan Pedurungan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, guna mendukung terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat konomi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, tujuan pembangunan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025–2029 ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029. Hal ini merupakan gambaran kontribusi Kecamatan Pedurungan sebagai perangkat daerah yang membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam

mencapai visi "**Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif**".

3.1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pedurungan

Tujuan ini merupakan impact dari keseluruhan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan. Impact tersebut harus menggambarkan pencapaian tujuan akhir dari kinerja utama setiap unsur pelaksana pembangunan di Kecamatan Pedurungan.

Berdasarkan visi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yaitu

1. Indikator Tujuan: **Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Pedurungan**
   Aspek Pengukuran:
   a. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (60%);
   b. Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) (20%);
   c. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan (20%).
2. Indikator Tujuan: **Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan**
   Aspek Pengukuran:
   a. Kepengurusan aktif lembaga kemasyarakatan (20%);
   b. Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari seluruh elemen masyarakat (30%);
   c. Efektivitas pelaksanaan kegiatan yang berdampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (50%).

Dengan adanya tujuan tersebut, Kecamatan Pedurungan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang, sekaligus menjawab tantangan serta isu strategis yang telah diidentifikasi dalam dokumen ini.

3.1.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pedurungan

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dimana Kecamatan Pedurungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Pedurungan.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pedurungan maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan**
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pedurungan**.

Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.

2. **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pedurungan**
   Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Pedurungan

Dengan indikator sasaran yaitu "**Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Pedurungan**".

Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan

Dengan indikator sasaran yaitu "**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan**".

Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Pedurungan melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Pedurungan.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2025-2030 sebagai berikut

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat											
	TUJUAN :										
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Pedurungan	Angka	95	96	96,5	97	97,5	98	
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pedurungan	Angka	76	76,3	76,6	76,8	77	77,3	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pedurungan	Angka	93,5	93,8	94	94,5	95	95,5	
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Pedurungan	Persen	95	96	97	98	99	100	
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Pedurungan	Angka	79	80	81	82	83	84	
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang											
		SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan	Angka	78	80	82	84	86	88	

3.2 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pedurungan memerlukan perumusan strategi yang tepat. Strategi dimaknai sebagai langkah-langkah terencana yang memuat program-program indikatif guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menjelaskan arah dan cara pencapaian sasaran, yang kemudian diperkuat dengan rangkaian kebijakan pendukung.

Strategi disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis melalui pendekatan S–O (*Strengths–Opportunities*), yang memanfaatkan kekuatan atau keunggulan yang dimiliki untuk meraih peluang sekaligus menjawab tantangan yang ada. Kebijakan yang ditetapkan menjadi pedoman dalam menentukan konfigurasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik yang bersifat internal yaitu kebijakan dalam pengelolaan pelaksanaan program pembangunan maupun eksternal, yakni kebijakan yang diarahkan untuk mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2025–2029 dijabarkan secara bertahap per tahun dan disajikan dalam tabel pada bagian berikut.

Tabel 3. 2 Tahapan Strategi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Sinkronisasi optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	Optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	Penguatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	Percepatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	Perwujudan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Pedurungan

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2025

3.3 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Untuk mencapai sasaran dirumuskan beberapa strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi 1 Mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Pedurungan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

a) peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Pedurungan;

b) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Pedurungan;
c) peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Pedurungan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Strategi 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

a) peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Pedurungan;
b) peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
c) peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Pedurungan;
d) peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Pedurungan;
e) peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Pedurungan;
f) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Pedurungan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Strategi 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pedurungan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

a) peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pedurungan;
b) peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Pedurungan;
c) peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan;
d) peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Pedurungan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi	peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Pedurungan	
		Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Pedurungan	

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Pedurungan	
			peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Pedurungan	
			peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait	
			peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	
			peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Pedurungan	
			peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Pedurungan	
			peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Pedurungan	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan	peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pedurungan	
			peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Pedurungan	
			peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan	
			peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Pedurungan	

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2025

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Visi : Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif			
Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan	mengoptimalkan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	1. peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Pedurungan
			2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Pedurungan
			3. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Pedurungan
	2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan	1. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Pedurungan
			2. peningkatan fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait
			3. peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Pedurungan
			4. peningkatan pelayanan kebersihan Kecamatan Pedurungan
			5. peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Pedurungan
			6. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Pedurungan
	3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pedurungan	1. peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pedurungan
			2. peningkatan kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Pedurungan
			3. peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan
			4. peningkatan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Pedurungan

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025–2029) yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Seluruh program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program prioritas yang akan dijalankan, disertai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan, khususnya indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*).

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta mencerminkan komitmen Kecamatan Pedurungan untuk mencapai target kinerja pada tahun berjalan. Sebagai tahapan pelaksanaannya, Kecamatan Pedurungan perlu menyusun cascading kinerja guna memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Pedurungan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan				Indeks Kinerja layanan Kecamatan Pedurungan		Camat
					Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan		
		S1:Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pedurungan		Camat
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Pedurungan yang berkualitas	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sekretaris Kecamatan
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	7.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pedurungan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	7.0.101.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan, evaluasi dan keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	7.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.1.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Perencanaan, evaluasi dan keuangan
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Pedurungan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	7.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Pedurungan	7..01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7..01.01.1.06 .0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7..01.01.1.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7..01.01.1.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7..01.01.1.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7..01.01.1.06 .0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	7.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.1.07 .0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan yang selesai ditindaklanjuti	7.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.1.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.1.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Pedurungan sesuai ketentuan	7.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.1.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Umum dan Kepegawaian
		S2:Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan			Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan		Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Camat
				Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Staf Perekonomian dan Kesejateraan Sosial
				Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Staf Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pedurungan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepala Seksi Pelayanan Publik
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Staf Pelayanan Publik Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Penggaron Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Penggaron Kidul	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Penggaron Kidul
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Penggaron Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Tlogomulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Tlogomulyo	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Tlogomulyo
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Tlogomulyo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Tlogosari Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Tlogosari Wetan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Tlogosari Wetan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Tlogosari Wetan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Tlogosari Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Tlogosari Kulon	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Tlogosari Kulon
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Tlogosari Kulon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Muktiharjo Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Muktiharjo Kidul	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Muktiharjo Kidul
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Muktiharjo Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Plamongansari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Plamongansari	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Plamongansari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Plamongansari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Gemah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Gemah	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Gemah
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Gemah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Pedurungan Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Pedurungan Kidul	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Pedurungan Kidul
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Pedurungan Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Pedurungan Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Pedurungan Lor	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Pedurungan Lor
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Pedurungan Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Pedurungan Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Pedurungan Tengah	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Pedurungan Tengah
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Pedurungan Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Palebon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Palebon	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Palebon
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Palebon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Kidul Kalicari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Penggaron Kidul Kalicari	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul Kalicari
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sekretaris/Staf Kelurahan Penggaron Kidul Kalicari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kepala Seksi Pembangunan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Pedurungan	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Staff Seksi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Penggaron Kidul
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Penggaron Kidul	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Penggaron Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tlogomulyo
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tlogomulyo	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Tlogomulyo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tlogosari Wetan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tlogosari Wetan	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Tlogosari Wetan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Tlogosari Kulon
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Tlogosari Kulon	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Tlogosari Kulon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Muktiharjo Kidul
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Muktiharjo Kidul	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Muktiharjo Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Plamongansari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Plamongansari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Plamongansari	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Plamongansari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Gemah
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gemah	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Gemah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pedurungan Kidul
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pedurungan Kidul	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Pedurungan Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pedurungan Lor
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pedurungan Lor	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Pedurungan Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Pedurungan Tengah
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pedurungan Tengah	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Pedurungan Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Palebon
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Palebon	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Palebon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Lurah Kalicari
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Kalicari	7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Pembangunan/Staf Kelurahan Kalicari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Camat
				Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	7.01.04 .2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04 .2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 .0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Staf Seksi Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan di Kota Semarang		S3:Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan			Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan		
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Camat
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 .0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Staf Seksi Pembangunan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Penggaron Kidul
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penggaron Kidul	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Penggaron Kidul
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tlogomulyo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogomulyo	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Tlogomulyo
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tlogosari Wetan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogosari Wetan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Tlogosari Wetan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Tlogosari Kulon
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogosari Kulon	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Tlogosari Kulon
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Muktiharjo Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Muktiharjo Kidul
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Plamongansari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plamongansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plamongansari	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Plamongansari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Gemah
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gemah	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Gemah
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Pedurungan Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pedurungan Kidul	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Pedurungan Kidul
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Pedurungan Lor
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pedurungan Lor	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Pedurungan Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Pedurungan Tengah
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pedurungan Tengah	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Pedurungan Tengah
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Palebon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Palebon	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Palebon
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lurah Kalicari
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalicari	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Perekonomian dan Kesejateraan Sosial/Staf Kelurahan Kalicari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan Pedurungan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Penggaron Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Penggaron Kidul	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Penggaron Kidul
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tlogomulyo
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Tlogomulyo	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Tlogomulyo

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tlogosari Wetan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Tlogosari Wetan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Tlogosari Wetan
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Tlogosari Kulon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Tlogosari Kulon	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Tlogosari Kulon
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Muktiharjo Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Muktiharjo Kidul	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Muktiharjo Kidul
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Plamongansari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Plamongansari	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Plamongansari

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Gemah
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Gemah	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Gemah
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pedurungan Kidul

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pedurungan Kidul	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Pedurungan Kidul
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pedurungan Lor

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pedurungan Lor	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Pedurungan Lor
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Pedurungan Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pedurungan Tengah	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Pedurungan Tengah
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Palebon
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Palebon	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Palebon

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lurah Kalicari
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Kalicari	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Staf Kelurahan Kalicari
				Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Staf Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan menetapkan bentuk dukungan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Bentuk dukungan tersebut dituangkan secara terstruktur dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan**	**Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan**		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	**Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran gratis yang tersedia di setiap Kelurahan**	**Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3	**Peningkatan peran serta Masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui system keamanan lingkungan (siskamling)**	**Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib**		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	**Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
5	**Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang**	**Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
6	**Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil**			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	**Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi**			
8	**Peningkatan peran RT, RW, PKK dan LPMK**			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Untuk selanjutnya, akan diuraikan program-program yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, sekaligus memenuhi standar layanan Kecamatan Pedurungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Rencana program ini kemudian dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan pada setiap program, yang pemilihannya didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Setiap rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaian dan pagu indikatif sebagai gambaran kebutuhan pendanaan. Demikian pula, rencana kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan *output*, target capaian, dan pagu indikatif. *Outcome* program dan output kegiatan saling terkait, di mana *outcome* mencerminkan manfaat jangka menengah bagi penerima manfaat (*beneficiaries*) sebagai hasil berfungsinya *output* dari kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, digunakan kerangka logis perencanaan kinerja untuk memastikan keterkaitan langsung dengan strategi dan arah kebijakan, sehingga menjadi operasional dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga memperhatikan tugas dan fungsi setiap unsur organisasi kecamatan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Penetapan indikator *outcome* program serta indikator *output* kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan struktur organisasi Kecamatan Pedurungan, sehingga setiap unsur memiliki tugas, kewenangan, dan target kinerja yang jelas. Selanjutnya, rencana kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan akan disusun secara bertahap untuk periode 2025–2029, dengan menentukan indikator *output* yang mendukung pencapaian indikator outcome program, beserta pagu indikatif anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 – 2030

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN				84.912.338.495		90.338.659.168		92.700.446.504		93.134.273.276		94.157.580.792	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				21.278.011.731		23.689.609.181		24.739.248.644		24.932.052.498		25.386.836.862	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Pedurungan yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				114.133.115		127.068.680		132.698.839		133.733.020		136.172.436	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pedurungan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.289.888		55.989.618		58.470.405		58.926.092		60.000.959	Kecamatan Pedurungan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.376.703		4.872.748		5.088.650		5.128.308		5.221.853	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.445.723		4.949.590		5.168.896		5.209.179		5.304.199	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.479.441		3.873.792		4.045.432		4.076.960		4.151.328	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.755.522		4.181.164		4.366.423		4.400.452		4.480.720	Kecamatan Pedurungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.772.436		1.973.320		2.060.754		2.076.814		2.114.697	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 laporan	5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				46.013.402		51.228.448		53.498.279		53.915.215		54.898.680	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	NA	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.937.389.478		19.970.369.029		20.855.216.360		21.017.750.241		21.401.134.008	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.257.921.720		19.213.892.068		20.065.221.408		20.221.598.510		20.590.459.711	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	100 orang/bulan	103 orang/bulan		103 orang/bulan		103 orang/bulan		103 orang/bulan		103 orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				672.955.205		749.226.291		782.423.018		788.520.785		802.904.155	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.344.696		1.497.101		1.563.435		1.575.620		1.604.361	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.375.322		4.871.210		5.087.044		5.126.690		5.220.206	Kecamatan Pedurungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	6 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				792.535		882.359		921.455		928.636		945.575	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				43.068.893		47.950.215		50.074.794		50.465.049		51.385.580	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Pedurungan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	NA	89 angka		90 angka		91 angka		92 angka		93 angka		
7.01.01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9.202.680		10.245.689		10.699.655		10.783.042		10.979.735	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	NA	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7.01.01.2.05.011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				33.866.213		37.704.526		39.375.139		39.682.007		40.405.845	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.027.387.417		1.143.828.977		1.194.509.763		1.203.819.103		1.225.777.909	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Pedurungan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.412.062		46.105.603		48.148.451		48.523.693		49.408.811	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45 paket	45 paket		45 paket		45 paket		45 paket		45 paket		
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.141.047		16.857.096		17.604.000		17.741.196		18.064.812	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5 paket	25 paket		25 paket		25 paket		25 paket		25 paket		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				149.375.883		166.305.778		173.674.456		175.027.977		178.220.654	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				364.954.441		406.317.479		424.320.598		427.627.515		435.427.848	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				456.503.984		508.243.021		530.762.258		534.898.722		544.655.784	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				94.479.041		105.187.063		109.847.693		110.703.784		112.723.126	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				94.479.041		105.187.063		109.847.693		110.703.784		112.723.126	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.397.845.737		1.556.274.131		1.625.229.542		1.637.895.671		1.667.772.447	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				248.472.370		276.633.617		288.890.702		291.142.154		296.452.864	Kecamatan Pedurungan
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.149.373.367		1.279.640.514		1.336.338.840		1.346.753.517		1.371.319.583	Kecamatan Pedurungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				663.708.050		738.931.086		771.671.653		777.685.630		791.871.356	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Pedurungan sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				208.660.395		232.309.450		242.602.620		244.493.329		248.953.120	Kecamatan Pedurungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	82 Unit		62 Unit		64 Unit		64 Unit		64 Unit		
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				143.997.058		160.317.330		167.420.672		168.725.455		171.803.168	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	82 Unit		88 Unit		95 Unit		102 Unit		110 Unit		
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				311.050.597		346.304.306		361.648.361		364.466.846		371.115.068	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.973.119.957		4.393.458.666		4.576.409.638		4.610.015.131		4.689.283.532	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				544.831.338		602.472.103		627.560.046		632.168.343		643.038.366	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				44.223.324		48.901.951		50.938.306		51.312.354		52.194.660	Kecamatan Pedurungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				500.608.014		553.570.152		576.621.740		580.855.989		590.843.706	Kecamatan Pedurungan
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1.740.608.458		1.924.757.220		2.004.907.334		2.019.629.775		2.054.356.955	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				624.411.790		690.471.826		719.224.228		724.505.636		736.963.383	Kecamatan Pedurungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	624.411.790	12 Laporan	690.471.826	12 Laporan	719.224.228	12 Laporan	724.505.636	12 Laporan	736.963.383	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.179.649		83.133.327		86.595.138		87.231.023		88.730.945	Kelurahan Penggaron Kidul
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	75.179.649	12 Laporan	83.133.327	12 Laporan	86.595.138	12 Laporan	87.231.023	12 Laporan	88.730.945	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				92.868.978		102.694.110		106.970.465		107.755.971		109.608.816	Kelurahan Tlogomulyo

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	92.868.978	12 Laporan	102.694.110	12 Laporan	106.970.465	12 Laporan	107.755.971	12 Laporan	109.608.816	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				103.482.575		114.430.579		119.195.660		120.070.938		122.135.537	Kelurahan Tlogosari Wetan
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	103.482.575	12 Laporan	114.430.579	12 Laporan	119.195.660	12 Laporan	120.070.938	12 Laporan	122.135.537	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.558.307		122.254.892		127.345.790		128.280.916		130.486.684	Kelurahan Tlogosari Kulon

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	110.558.307	12 Laporan	122.254.892	12 Laporan	127.345.790	12 Laporan	128.280.916	12 Laporan	130.486.684	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.558.307		122.254.892		127.345.790		128.280.916		130.486.684	Kelurahan Muktiharjo Kidul
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	110.558.307	12 Laporan	122.254.892	12 Laporan	127.345.790	12 Laporan	128.280.916	12 Laporan	130.486.684	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				92.868.978		102.694.110		106.970.465		107.755.971		109.608.816	Kelurahan Plamongansari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	92.868.978	12 Laporan	102.694.110	12 Laporan	106.970.465	12 Laporan	107.755.971	12 Laporan	109.608.816	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				92.868.978		102.694.110		106.970.465		107.755.971		109.608.816	Kelurahan Gemah
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	92.868.978	12 Laporan	102.694.110	12 Laporan	106.970.465	12 Laporan	107.755.971	12 Laporan	109.608.816	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.446.646		97.803.914		101.876.633		102.624.734		104.389.348	Kelurahan Pedurungan Kidul

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	88.446.646	12 Laporan	97.803.914	12 Laporan	101.876.633	12 Laporan	102.624.734	12 Laporan	104.389.348	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				84.024.313		92.913.718		96.782.801		97.493.497		99.169.881	Kelurahan Pedurungan Lor
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	84.024.313	12 Laporan	92.913.718	12 Laporan	96.782.801	12 Laporan	97.493.497	12 Laporan	99.169.881	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				92.868.978		102.694.110		106.970.465		107.755.971		109.608.816	Kelurahan Pedurungan Tengah

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	92.868.978	12 Laporan	102.694.110	12 Laporan	106.970.465	12 Laporan	107.755.971	12 Laporan	109.608.816	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.446.646		97.803.914		101.876.633		102.624.734		104.389.348	Kelurahan Palebon
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	88.446.646	12 Laporan	97.803.914	12 Laporan	101.876.633	12 Laporan	102.624.734	12 Laporan	104.389.348	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				84.024.313		92.913.718		96.782.801		97.493.497		99.169.881	Kelurahan Kalicari

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporan	84.024.313	12 Laporan	92.913.718	12 Laporan	96.782.801	12 Laporan	97.493.497	12 Laporan	99.169.881	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1.687.680.161		1.866.229.343		1.943.942.258		1.958.217.013		1.991.888.211	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.241.909.069		1.373.297.615		1.430.484.026		1.440.988.357		1.465.765.899	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	12 laporan	1.241.909.069	12 Laporan	1.373.297.615	12 Laporan	1.430.484.026	12 Laporan	1.440.988.357	12 Laporan	1.465.765.899	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Penggaron Kidul
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Tlogomulyo
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Tlogosari Wetan
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Tlogosari Kulon
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Muktiharjo Kidul
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Plamongansari
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Gemah
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Pedurungan Kidul
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Pedurungan Lor
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Pedurungan Tengah
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Palebon
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				37.147.591		41.077.644		42.788.186		43.102.388		43.843.526	Kelurahan Kalicari
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA	12 laporan	37.147.591	12 Laporan	41.077.644	12 Laporan	42.788.186	12 Laporan	43.102.388	12 Laporan	43.843.526	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				59.158.449.680		61.699.644.689		62.805.691.042		63.008.856.040		63.488.080.197	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	99%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.029.236.852		1.073.448.481		1.092.691.444		1.096.226.102		1.104.563.630	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	120 kegiatan		122 kegiatan		124 kegiatan		126 kegiatan		128 kegiatan		
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				49.723.793		51.859.716		52.789.369		52.960.133		53.362.930	Kecamatan Pedurungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kecamatan	9 lembaga	6 lembaga	49.723.793	6 lembaga	51.859.716	6 lembaga	52.789.369	6 lembaga	52.960.133	6 lembaga	53.362.930	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				326.799.089		340.836.980		346.946.926		348.069.236		350.716.536	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kecamatan	4 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	326.799.089	3 Pokmas/ Ormas	340.836.980	3 Pokmas/ Ormas	346.946.926	3 Pokmas/ Ormas	348.069.236	3 Pokmas/ Ormas	350.716.536	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				37.354.711		38.959.311		39.657.708		39.785.993		40.088.592	Kelurahan Penggaron Kidul
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	37.354.711	6 Pokmas/ Ormas	38.959.311	6 Pokmas/ Ormas	39.657.708	6 Pokmas/ Ormas	39.785.993	6 Pokmas/ Ormas	40.088.592	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				54.045.114		56.366.662		57.377.109		57.562.714		58.000.517	Kelurahan Tlogomulyo
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	54.045.114	6 Pokmas/ Ormas	56.366.662	6 Pokmas/ Ormas	57.377.109	6 Pokmas/ Ormas	57.562.714	6 Pokmas/ Ormas	58.000.517	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				37.354.711		38.959.311		39.657.708		39.785.993		40.088.592	Kelurahan Tlogosari Wetan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	37.354.711	6 Pokmas/ Ormas	38.959.311	6 Pokmas/ Ormas	39.657.708	6 Pokmas/ Ormas	39.785.993	6 Pokmas/ Ormas	40.088.592	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				83.253.320		86.829.528		88.386.060		88.671.972		89.346.381	Kelurahan Tlogosari Kulon
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	83.253.320	6 Pokmas/ Ormas	86.829.528	6 Pokmas/ Ormas	88.386.060	6 Pokmas/ Ormas	88.671.972	6 Pokmas/ Ormas	89.346.381	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				76.994.418		80.301.770		81.741.284		82.005.702		82.629.410	Kelurahan Muktiharjo Kidul
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	76.994.418	6 Pokmas/ Ormas	80.301.770	6 Pokmas/ Ormas	81.741.284	6 Pokmas/ Ormas	82.005.702	6 Pokmas/ Ormas	82.629.410	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				58.217.715		60.718.500		61.806.958		62.006.892		62.478.495	Kelurahan Plamongansari
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	58.217.715	6 Pokmas/ Ormas	60.718.500	6 Pokmas/ Ormas	61.806.958	6 Pokmas/ Ormas	62.006.892	6 Pokmas/ Ormas	62.478.495	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				49.872.513		52.014.824		52.947.258		53.118.532		53.522.534	Kelurahan Gemah
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	49.872.513	6 Pokmas/ Ormas	52.014.824	6 Pokmas/ Ormas	52.947.258	6 Pokmas/ Ormas	53.118.532	6 Pokmas/ Ormas	53.522.534	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				51.958.814		54.190.743		55.162.183		55.340.623		55.761.525	Kelurahan Pedurungan Kidul
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	51.958.814	6 Pokmas/ Ormas	54.190.743	6 Pokmas/ Ormas	55.162.183	6 Pokmas/ Ormas	55.340.623	6 Pokmas/ Ormas	55.761.525	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				51.958.814		54.190.743		55.162.183		55.340.623		55.761.525	Kelurahan Pedurungan Lor
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	51.958.814	6 Pokmas/ Ormas	54.190.743	6 Pokmas/ Ormas	55.162.183	6 Pokmas/ Ormas	55.340.623	6 Pokmas/ Ormas	55.761.525	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				56.131.414		58.542.581		59.592.032		59.784.801		60.239.505	Kelurahan Pedurungan Tengah
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	56.131.414	6 Pokmas/ Ormas	58.542.581	6 Pokmas/ Ormas	59.592.032	6 Pokmas/ Ormas	59.784.801	6 Pokmas/ Ormas	60.239.505	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				47.786.213		49.838.906		50.732.333		50.896.444		51.283.544	Kelurahan Palebon
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	47.786.213	6 Pokmas/ Ormas	49.838.906	6 Pokmas/ Ormas	50.732.333	6 Pokmas/ Ormas	50.896.444	6 Pokmas/ Ormas	51.283.544	
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				47.786.213		49.838.906		50.732.333		50.896.444		51.283.544	Kelurahan Kalicari
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	47.786.213	6 Pokmas/ Ormas	49.838.906	6 Pokmas/ Ormas	50.732.333	6 Pokmas/ Ormas	50.896.444	6 Pokmas/ Ormas	51.283.544	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				58.129.212.828		60.626.196.208		61.712.999.599		61.912.629.938		62.383.516.567	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				126.298.435		131.723.678		134.084.996		134.518.737		135.541.841	Kecamatan Pedurungan
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan - Kecamatan	9 lembaga	3 Lembaga	126.298.435	3 Lembaga	131.723.678	3 Lembaga	134.084.996	3 Lembaga	134.518.737	3 Lembaga	135.541.841	Kecamatan Pedurungan
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.809.826.743		1.887.569.191		1.921.406.322		1.927.621.723		1.942.282.565	Keluraha n Penggaro n Kidul
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	1.809.826.743	6 Lembaga	1.887.569.191	6 Lembaga	1.921.406.322	6 Lembaga	1.927.621.723	6 Lembaga	1.942.282.565	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.624.471.902		4.823.119.517		4.909.580.206		4.925.461.805		4.962.923.210	Keluraha n Tlogomul yo
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	4.624.471.902	6 Lembaga	4.823.119.517	6 Lembaga	4.909.580.206	6 Lembaga	4.925.461.805	6 Lembaga	4.962.923.210	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.201.172.886		2.295.725.898		2.336.879.769		2.344.439.150		2.362.270.165	Kelurahan Tlogosari Wetan
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	2.201.172.886	6 Lembaga	2.295.725.898	6 Lembaga	2.336.879.769	6 Lembaga	2.344.439.150	6 Lembaga	2.362.270.165	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				11.630.713.509		12.130.319.419		12.347.771.166		12.387.713.961		12.481.930.746	Kelurahan Tlogosari Kulon
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	11.630.713.509	6 Lembaga	12.130.319.419	6 Lembaga	12.347.771.166	6 Lembaga	12.387.713.961	6 Lembaga	12.481.930.746	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				10.234.548.948		10.674.181.576		10.865.530.159		10.900.678.174		10.983.585.065	Kelurahan Muktiharjo Kidul
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	10.234.548.948	6 Lembaga	10.674.181.576	6 Lembaga	10.865.530.159	6 Lembaga	10.900.678.174	6 Lembaga	10.983.585.065	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.387.269.518		4.575.727.929		4.657.753.801		4.672.820.789		4.708.360.691	Kelurahan Plamongansari
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	4.387.269.518	6 Lembaga	4.575.727.929	6 Lembaga	4.657.753.801	6 Lembaga	4.672.820.789	6 Lembaga	4.708.360.691	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.254.407.542		4.437.158.769		4.516.700.609		4.531.311.315		4.565.774.944	Kelurahan Gemah
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	4.254.407.542	6 Lembaga	4.437.158.769	6 Lembaga	4.516.700.609	6 Lembaga	4.531.311.315	6 Lembaga	4.565.774.944	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.556.842.390		3.709.629.188		3.776.129.114		3.788.344.205		3.817.157.077	Kelurahan Pedurungan Kidul
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	3.556.842.390	6 Lembaga	3.709.629.188	6 Lembaga	3.776.129.114	6 Lembaga	3.788.344.205	6 Lembaga	3.817.157.077	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.360.135.063		3.504.472.153		3.567.294.373		3.578.833.921		3.606.053.328	Kelurahan Pedurungan Lor
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	3.360.135.063	6 Lembaga	3.504.472.153	6 Lembaga	3.567.294.373	6 Lembaga	3.578.833.921	6 Lembaga	3.606.053.328	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.128.432.493		5.348.728.108		5.444.611.014		5.462.223.342		5.503.767.174	Kelurahan Pedurungan Tengah
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	5.128.432.493	6 Lembaga	5.348.728.108	6 Lembaga	5.444.611.014	6 Lembaga	5.462.223.342	6 Lembaga	5.503.767.174	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.839.711.105		4.004.648.739		4.076.437.275		4.089.623.809		4.120.728.111	Kelurahan Palebon
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	3.839.711.105	6 Lembaga	4.004.648.739	6 Lembaga	4.076.437.275	6 Lembaga	4.089.623.809	6 Lembaga	4.120.728.111	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.923.122.587		3.048.687.482		3.103.339.169		3.113.377.908		3.137.057.212	Kelurahan Kalicari
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	6 Lembaga	2.923.122.587	6 Lembaga	3.048.687.482	6 Lembaga	3.103.339.169	6 Lembaga	3.113.377.908	6 Lembaga	3.137.057.212	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				9.944.759		10.371.943		10.557.873		10.592.026		10.672.586	Kecamatan Pedurungan
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				42.314.948		44.132.618		44.923.753		45.069.073		45.411.852	Kecamatan Pedurungan
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				481.666.830		532.625.074		554.804.473		558.878.514		568.488.332	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				481.666.830		532.625.074		554.804.473		558.878.514		568.488.332	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	NA	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				481.666.830		532.625.074		554.804.473		558.878.514		568.488.332	Kecamatan Pedurungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				21.090.297		23.321.558		24.292.707		24.471.093		24.891.869	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	80%	82%		84%		86%		88%		90%		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				21.090.297		23.321.558		24.292.707		24.471.093		24.891.869	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				21.090.297		23.321.558		24.292.707		24.471.093		24.891.869	Kecamatan Pedurungan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target/ Pagu Indikatif/ Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2025

Pendapatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025–2030 direncanakan berasal dari Retribusi Daerah serta penerimaan sewa aset yang dikelola oleh Kecamatan sebagai pengguna barang. Rencana pendapatan ini menjadi salah satu penopang penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, optimalisasi aset daerah, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Pedurungan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4 Rencana Pendapatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2030

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET MURNI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kecamatan Pedurungan	61.600.000	64.680.000	67.914.000	71.309.700	74.875.185	78.618.944
	RETRIBUSI DAERAH	61.600.000	64.680.000	67.914.000	71.309.700	74.875.185	78.618.944
	Retribusi Jasa Usaha	61.600.000	64.680.000	67.914.000	71.309.700	74.875.185	78.618.944
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	57.600.000	60.480.000	63.514.000	66.709.700	70.075.185	73.518.944
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	57.600.000	60.480.000	63.514.000	66.709.700	70.075.185	73.518.944
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000	5.100.000
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000	5.100.000

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai oleh setiap unit kerja. Pada lingkup Kecamatan Pedurungan, indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh kecamatan dituangkan dalam bentuk standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan daerah. Penetapan standar pelayanan ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin kualitas dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Indikator kinerja sendiri adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Indikator ini harus dapat dihitung atau diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai capaian kinerja pada tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap *pasca* kegiatan (*ex post*).

Dalam penyelenggaraan sektor publik, termasuk pada tingkat kecamatan, sistem akuntabilitas kinerja kerap menghadapi tantangan berupa kesulitan dalam mengukur capaian dan menentukan indikator yang tepat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sektor publik yang berbeda dengan sektor bisnis, khususnya dalam hal *output*, *outcome*, dan tujuan utama organisasi. Sebagian besar output pemerintah berbentuk jasa pelayanan publik yang tidak selalu mudah diukur baik secara kuantitas maupun kualitas.

Indikator kinerja Kecamatan Pedurungan yang disusun mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung mencerminkan capaian kinerja lima tahunan, sebagai bentuk komitmen Kecamatan Pedurungan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rincian indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pedurungan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan : Meningkatkan Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan									
	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Pedurungan	Angka	95	96	96,5	97	97,5	98	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan									
	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	95	96	97	98	99	100	
	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan	Angka	79	80	81	82	83	84	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan									
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	78	80	82	84	86	88	

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025–2030, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persen	97,19	98,49	99,79	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99,30	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pedurungan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan RPJMD Kota Semarang untuk lima tahun mendatang. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman sekaligus penentu arah dan tujuan bagi seluruh aparatur Kecamatan Pedurungan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan wilayah, dan pelayanan publik bagi seluruh pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab kecamatan. Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029, dan setiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pedurungan.

Permasalahan di wilayah Kecamatan Pedurungan memiliki tingkat kompleksitas yang memerlukan sinergi lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh kecamatan. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan adalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program serta kegiatan antar seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Pedurungan.

Tahap kedua adalah membangun komitmen dan memperkuat kerja sama dengan seluruh pihak terkait, termasuk perangkat daerah lain, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat di tingkat kota hingga kelurahan. Apabila kedua langkah ini dilaksanakan dengan baik, seluruh potensi yang ada di wilayah Kecamatan Pedurungan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sistem pengelolaan wilayah yang terpadu, efektif, dan efisien.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra ini memerlukan partisipasi aktif, semangat, komitmen, tanggung jawab, dan kerja keras seluruh aparatur Kecamatan Pedurungan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dinilai dari keberhasilannya mencapai target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai, Kecamatan Pedurungan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan wilayah, dan pelayanan publik yang optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Harapannya, Rencana Strategis Kecamatan Pedurungan Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, khususnya di wilayah Kecamatan Pedurungan.

52. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140); dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Kesatuan dan Politik, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan

perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusatamaan Gender;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sumber daya, kinerja

pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan sasaran dan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah membantu Walikota/Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan UPTB;
- perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB;
- penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan;
- penyelenggaraan kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA);
- penyelenggaraan kerja sama Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB;
- penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
- penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB;
- penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB;
- penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai beriku

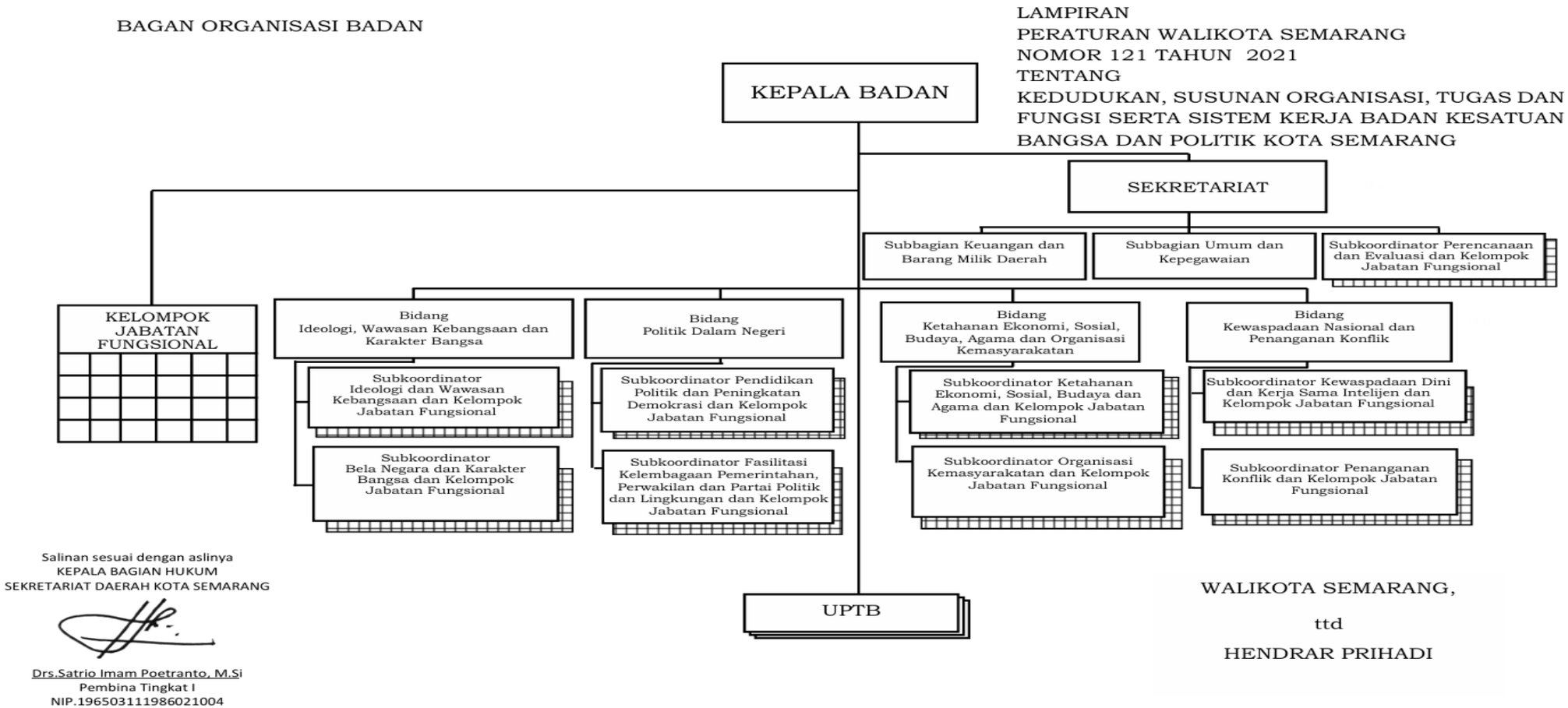

Gambar 2. 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
   Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

2. Sekretaris
   Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
   - perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
   - pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   - pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB;
   - pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB;
   - pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Badan;
   - pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan UPTB;

- pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
- pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
- pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Badan;
- pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;
- pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan;
- pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan;
- pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sekretariat, terdiri dari :

a) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
c) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian sedangkan Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a) **Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
   - menyiapkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
   - menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
   - menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Badan;
   - menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;
   - menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan /pengawasan;
   - menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Badan;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
   - menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
   - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
   - menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   - menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
   - menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
   - menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   - menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan;

- menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan;
- menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan;
- menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan;
- menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi

Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
- menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan,

pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Badan;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
- menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi; .
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara dan Karakter Bangsa. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
- perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan ideologi negara dan pendidikan wawasan kebangsaan;
- pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

- pelaksanaan kegiatan penanaman, pengembangan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dalam rangka peningkatan nasionalisme;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi perubahan kebijakan terkait dengan masalah wawasan kebangsaan;
- pelaksanaan kegiatan kerja sama guna pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan;
- pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara;
- pelaksanaan kegiatan koordinasi aparatur pemerintah kota, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan organisasi pers dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara;
- pelaksanaan kegiatan upacara hari Bela Negara;
- pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan;
- pelaksanaan kegiatan Forum Dialog Pelestarian Bhineka Tunggal Ika;
- pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pelestarian karakter bangsa;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, terdiri dari :

a) Subkoordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
b) Subkoordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

a) Subkoordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Subkoordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan pembinaan ketahanan ideologi negara dan pendidikan wawasan kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan peningkatan dan pengembangan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan penanaman, pengembangan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dalam rangka peningkatan nasionalisme;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi perubahan kebijakan terkait dengan masalah wawasan kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan kerja sama guna pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi kegiatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa

Subkoordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas :

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perancangan Teknis;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- menyiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran Bela Negara;
- menyiapkan kegiatan koordinasi aparatur pemerintah kota, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan organisasi pers dalam rangka peningkatan kesadaran Bela Negara;
- menyiapkan kegiatan penyelenggaraan upacara hari bela negara;

- menyiapkan kegiatan penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi forum pembauran kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan Forum Dialog Pelestarian Bhineka Tunggal Ika;
- menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pelestarian karakter bangsa
- menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- menyiapkan kegiatan monitoring dan evalusasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bela Negara dan Karakter Bangsa.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina,mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkung tanggungjawabnya;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri;
- pelaksanaan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- pelaksanaan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota;
- pelaksanaan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan politik dan etika budaya politik;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- pelaksanaan bahan kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah;
- pelaksanaan bahan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- koordinasi kelembagaan pelaksanaan kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA);

- pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Politik Dalam Negeri;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Politik Dalam Negeri;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
a) Subkoordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
b) Subkoordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik.

Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

a) Subkoordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Subkoordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas :
- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota;
- menyiapkan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan politik dan etika budaya politik;
- menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- menyiapkan bahan kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;

- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

Subkoordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- menyiapkan bahan fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- menyiapkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- koordinasi kelembagaan menyiapkan kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA);
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- melaksankaan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan;
- dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- pelaksanaan kegiatan koordinasi instansi yang menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- pelaksanaan kegiatan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama;
- pelaksanaan bahan penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat;
- pelaksanaan bahan kegiatan penerbitan izin pendirian rumah ibadat;
- pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan camat serta instansi terkait dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- pelaksanaan analisa dampak dinamika perkembangan ekonomi, sosial dan budaya terhadap stabilitas dan kondusifitas wilayah;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- pelaksanaan kegiatan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan
- pelaksanaan kegiatan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan izin operasional organisasi kemasyarakatan asing;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi;

- dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

a) Subkoordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
b) Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan.

Masing-masing Subkoordinator tersebut dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

a) Subkoordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Subkoordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, mempunyai tugas :

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- menyiapkan kegiatan koordinasi instansi yang menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- menyiapkan kegiatan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat;
- menyiapkan bahan kegiatan penerbitan izin pendirian rumah ibadat;
- menyiapkan kegiatan koordinasi dengan camat serta instansi terkait dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- menyiapkan analisa dampak dinamika perkembangan ekonomi, sosial dan budaya terhadap stabilitas dan kondusifitas wilayah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan

Subkoordimator Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan Organisasi Kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- menyiapkan bahan penerbitan izin operasional organisasi kemasyarakatan asing;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Organisasi Kemasyarakatan;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan;
- dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
   Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik

   Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
   - penyusunan kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
   - pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik;
   - pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan sejenisnya;
   - pelaksanaan kegiatan pendeteksian, pengindentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
   - pelaksanaan kegiatan koordinasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini;
   - pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan berbagai unsur intelijen negara di daerah;
   - pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan bidang kewaspadaan;
   - pelaksanaan kegiatan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
   - pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan konflik sosial antara lain koordinasi memelihara kondisi damai dalam masyarakat, koordinasi mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, koordinasi meredam potensi konflik sosial dan koordinasi membangun sistem peringatan dini konflik sosial;
   - pelaksanaan pelaksaaan kegiatan koordinasi penghentian konflik sosial antara lain koordinasi penyusunan kajian penetapan status keadaan konflik sosial, koordinasi tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban konflik sosial, dan koordinasi bantuan penggunaan TNI;
   - pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi pemulihan pasca konflik sosial antara lain koordinasi rekonsiliasi, koordinasi rehabilitasi dan koordinasi rekonstruksi;
   - pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
   - pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari:

a) Subkoordinator Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen; dan
b) Subkoordinator Penanganan Konflik.

Masing-masing Subkoordinator tersebut dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

a) Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen

Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai tugas :

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
- menyiapkan pelaksanaan kegiatan penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan sejenisnya;
- menyiapkan kegiatan pendeteksian, pengindentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
- menyiapkan kegiatan koordinasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini;
- menyiapkan kegiatan kerja sama dengan berbagai unsur intelijen negara di daerah;
- menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan bidang kewaspadaan;
- menyiapkan kegiatan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Penanganan Konflik

Subkoordinator Penanganan Konflik, mempunyai tugas:

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penanganan Konflik;
- menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Penanganan Konflik;
- menyiapkan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan konflik sosial antara lain koordinasi memelihara kondisi damai dalam masyarakat, koordinasi mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, koordinasi meredam potensi konflik sosial dan koordinasi membangun sistem peringatan dini konflik sosial;
- menyiapkan pelaksaaan kegiatan koordinasi penghentian konflik sosial antara lain koordinasi penyusunan kajian penetapan status keadaan konflik sosial, koordinasi tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban konflik sosial, dan koordinasi bantuan penggunaan TNI;
- menyiapkan pelaksanaan kegiatan koordinasi pemulihan pasca konflik sosial antara lain koordinasi rekonsiliasi, koordinasi rehabilitasi dan koordinasi rekonstruksi;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Penanganan Konflik;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Penanganan Konflik;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik;
- melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan;
- dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPTB

Pada Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja UPTB diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota

8. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku. Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dapat menjalankan tugasnya bekerja secara individu/mandiri dan/atau tim kerja/kelompok.

2.1.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di klasifikasikan ke dalam tabel. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per Juli 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	1	-	1	5
3	D3	-	2	-	-	2
4	S1	11	13	4	2	30
5	S2	5	1	-	-	6
6	S3	-	-	-	-	-

Dari jumlah pegawai sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per Juli 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	3	5
2	Golongan III	6	8	14
3	Golongan IV	4	-	4
4	PPPK	9	4	13
5	Outsourcing	4	3	7

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Aset Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
N I H I L											

Tabel 2. 4
Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	240	Jl.Ronggolawe	240	Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.127.943.124

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2020-202

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indikator Tujuan																		
	Indeks Demokrasi	Indeks		v	N/A	N/A	72,2	72,4	72,8	N/A	N/A	95,35	95,18	89,72	N/A	N/A	132,05	131,46	123,24
2	Indikator Sasaran																		
	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks		v	N/A	N/A	73	73,5	74	N/A	N/A	82,13	83,63	84,34	N/A	N/A	112,51	113,78	113,97
	Nilai Akip Badan Kesbangpol	Nilai		v	N/A	N/A	75	76	77	N/A	N/A	78,96	79,65	80,15	N/A	N/A	105,28	104,80	104,09
3	Indikator Program																		
a	Indeks Pengamalan Pancasila	Indeks		v	N/A	N/A	2.0	2.1	2.2	N/A	N/A	3,194	3,204	3,78	N/A	N/A	159,70	152,57	171,82
b	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks		v	N/A	N/A	62	64	66	N/A	N/A	98,2	98,20	90,23	N/A	N/A	158,39	153,44	136,71
c	Prosentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada	Persen		v	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	71.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
d	Indeks Kinerja Ormas	Indeks		v	N/A	N/A	55	57	58	N/A	N/A	63,81	66,098	65,05	N/A	N/A	116,02	115,96	112,16
e	Indeks Kerukunan Umat Bergama	Indeks		v	N/A	N/A	70	70.5	71	N/A	N/A	80,04	81.73	83,86	N/A	N/A	114,34	115,93	118,11
f	Prosentase Kemampuan Analisis Intelijen Stratehis Terhadap Gangguan Ipolekosbudhankam	Persen		v	N/A	N/A	81	82	83	N/A	N/A	81	95.35	95,45	N/A	N/A	100	116,28	115
g	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Persen		v	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
h	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Persen		v	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
i	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Persen		v	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
j	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	Persen		v	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Demokrasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, capaian indeks demokrasi mencapai angka 95,35 yang berkaitan erat dengan kondisi pemulihan pasca Covid-19 dimana anggaran pendidikan dan kesehatan mendapatkan perhatian lebih sehingga memenuhi batas minimal penganggaran yang diwajibkan. Namun pada tahun 2023, capaian angka indeks demokrasi mengalami penurunan sebesar 0,17 angka indeks – atau sekitar 0,18%- ke angka 95,18. Hal ini disebabkan pada aspek III Lembaga Demokrasi terkait Alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan yang idealnya adalah 40% dari total anggaran Belanja pada APBD Kota Semarang Tahun 2023 hanya dianggarkan sebesar 28,88% total anggaran Belanja pada APBD Kota Semarang Tahun 2023.

Pada tahun 2024, capaian indeks demokrasi kembali mengalami penurunan 5,46 point -atau sekitar 5,74 %- ke angka 89,72 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Hal itu salah satunya disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat penyelenggaraan pesta demokrasi yaitu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPRD, DPD, DPR RI dan Pemilihan Kepala Daerah. Seluruh aspek pada Indeks Demokrasi tahun 2024 mengalami penurunan dimana aspek yang mengalami penurunan signifikan adalah Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga Demokrasi. Penurunan pada aspek kebebasan sipil salah satunya disebabkan oleh terjadinya peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan – yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan agenda penolakan revisi undang-undang Pilkada pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang berakhir ricuh. Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi penurunan angka capaian indeks demokrasi adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang – tercatat sampai dengan bulan Juli 2024 telah terjadi 59 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kota Semarang tergolong dalam lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih tinggi dalam angka kasus kekerasan terhadap perempuan – disusul Demak, Purwokerto, Banyumas, dan Pati.

Selain indeks demokrasi, indikator lain yang mengalami fluktuasi capaiannya adalah indeks kebebasan sipil. Pada tahun 2024, capaian indeks kebebasan sipil adalah 90,23 - atau menurun 7,97 point jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang menyentuh angka 98,20. Penurunan tersebut ditengarai disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. terjadinya peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan – yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan agenda penolakan revisi undang-undang Pilkada pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang berakhir ricuh. Pihak kepolisian sampai harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan para demonstran.

2. maraknya aksi kriminalitas yang dilancarkan oleh para gangster yang menyebabkan gangguan keresahan di masyarakat
3. masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang – tercatat sampai dengan bulan Juli 2024 telah terjadi 59 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kota Semarang tergolong dalam lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih tinggi dalam angka kasus kekerasan terhadap perempuan – disusul Demak, Purwokerto, Banyumas, dan Pati.

Indikator yang menggambarkan partisipasi ormas dalam pembangunan - yaitu Indeks Kinerja Ormas - turut mengalami fluktuasi pencapaian sepanjang periode Renstra 2021-2026. Capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,048 point jika dibandingkan capaian pada tahun 2023, yaitu dari 66,098 menjadi 65,05. Penurunan terjadi pada variabel program kerja ormas. Variabel program kerja mencatat nilai yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program oleh organisasi kemasyarakatan masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal perencanaan strategis dan eksekusi yang konsisten (berkelanjutan).

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kota Semarang. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Tabel 2. 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	N/A	*507.949.920*	*857.279.000*	*2.070.716.000*	*4.870.195.200*	N/A	*357.948.066*	*749.839.520*	*1.958.154.900*	*3.846.477.395*	N/A	*70,47*	*87,47*	*94,56*	*78,98*	*115,17*	*122,35*
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	N/A	*5.729.634.516*	*6.142.019.000*	*44.708.012.000*	*77.872.922.118*	N/A	*5.272.555.082*	*5.923.507.142*	*44.595.813.576*	*76.873.538.438*	N/A	*92,02*	*96,44*	*99,75*	*98,72*	*236,43*	*245,86*
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	N/A	*3.846.436.476*	*1.630.896.000*	*1.769.410.000*	*2.735.403.000*	N/A	*3.627.957.679*	*1.568.670.044*	*1.596.928.967*	*2.380.681.876*	N/A	*94,32*	*96,18*	*90,25*	*87,03*	*1,83*	*-1,96*
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	N/A	*340.615.823*	*2.672.683.000*	*4.163.067.000*	*4.360.045.200*	N/A	*309.913.535*	*2.480.681.344*	*4.102.856.922*	*3.789.737.322*	N/A	*90,99*	*92,82*	*98,55*	*86,92*	*248,39*	*252,73*
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	N/A	*1.769.378.000*	*1.803.357.000*	*3.663.383.000*	*4.542.095.400*	N/A	*1.326.121.093*	*1.691.887.160*	*3.585.369.024*	*4.037.293.792*	N/A	*74,95*	*93,82*	*97,87*	*88,89*	*43,02*	*50,70*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	N/A	*6.147.160.639*	*5.529.625.558*	*5.880.814.920*	*6.998.307.580*	N/A	*5.527.604.757*	*5.397.396.333*	*5.674.277.109*	*6.526.630.414*	N/A	*89,92*	*97,61*	*96,49*	*93,26*	*5,10*	*5,93*
TOTAL	N/A	*18.341.175.374*	*18.635.859.558*	*62.255.402.920*	*101.378.968.498*	N/A	*16.422.100.212*	*17.811.981.543*	*61.513.400.498*	*97.454.359.237*	N/A	*89,54*	*95,58*	*98,81*	*96,13*	*99,50*	*104,08*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran tertinggi selama lima tahun terakhir adalah program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekoomi, sosial, dan budaya yang mencapai angka 252,73%. Selama kurun waktu akhir periode Renstra, program dimaksud aktif melaksanakan keiatan kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) yang mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran – ditambah lagi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti prosedur pendirian rumah ibadat yang makin mengoptimalkan penyerapan anggaran program tersebut. Sementara rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran tertinggi selama lima tahun terakhir adalah program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mencapai angka (1.96%). Kondisi dimaksud disebabkan antara lain karena belanja pada program dimaksud menyesuaikan dengan harga pasar, terdapat penembalian pada belanja Hibah- yaitu Hibah KOPRI, dan fasilitasi ormas yang tidak terserap maksimal karena realisasinya tergantung pada permohonan dari ormas.

c. Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bermitra dengan :

- FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Kota Semarang;
- Kodim 0733 BS/ Semarang dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui serangkaian giat TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa);
- Pengurus PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kota Semarang yang diharapkan dapat menjadi agen-agen revitalisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di lingkungannya masing-masing;
- FKSB (Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu) Kota Semarang;
- FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Semarang;
- Relawan/ Penggiat Anti Narkoba Kota Semarang;
- FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kota Semarang;
- Instansi vertikal di daerah terkait urusan keamanan dan ketertiban wilayah.

d. Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Inovasi yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 7
Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

NO	JUDUL INOVASI	TAHUN
1	Kegiatan Ormas – NGO Expo	2021
2	Digitalisasi Pelayanan Orang Asing (Surat Keterangan Tanda Lapor-SKTL) Melalui Aplikasi Si-Ketel	2022
3	Ormas – Community Award Tahun 2022	2022
4	Orientasi Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan (Fun Game)	2024-2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan pelayanan dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun 2021, dilaksanakan Kegiatan Ormas – NGO Expo sebagai wadah mempertemukan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk saling bertukar informasi, memperluas jejaring, serta mempromosikan program kerja mereka kepada masyarakat luas.

Selanjutnya, pada tahun 2022, dilakukan Digitalisasi Pelayanan Orang Asing melalui aplikasi Si-Ketel untuk mempermudah proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL). Inovasi ini bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan bagi warga negara asing yang berada di Kota Semarang. Di tahun yang sama, digelar pula Ormas – Community Award 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan penguatan nilai kebangsaan.

Untuk periode 2024–2025, Badan Kesbangpol Kota Semarang melaksanakan program Orientasi Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan (Fun Game) yang dikemas secara kreatif dan interaktif. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda dengan metode yang menyenangkan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan.

e. Penghargaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Penghargaan yang diperoleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sepanjang tahun 2021-2025 antara lain:

1. Peringkat 7 Kota Skor Toleransi Tertinggi Di Indonesia Menurut Studi Indeks Kota Toleran 2022 Yang Diselenggarakan Oleh Setara Institute;
2. Penghargaan Kepada Pemerintah Kota Semarang Atas Dukungannya dalam Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 202;3 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Peringkat 5 Kota Skor Toleransi Tertinggi Di Indonesia Menurut Studi Indeks Kota Toleran 2023 Yang diselenggarakan oleh Setara Institute;
4. Wakil Paskibraka dari Kota Semarang terpilih menjadi pembentang bendera merah putih dalam upacara HUT ke-79 RI di Semarang Tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN);
5. Peringkat 3 Kota Skor Toleransi Tertinggi Di Indonesia Menurut Studi Indeks Kota Toleran 2024 Yang Diselenggarakan Oleh Setara Institute;
6. Pioner Pembangunan Inklusi Sosial Dengan Skor 3,6 Dalam Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) 2024.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai berikut:

1) Memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat dengan metode yang inovatif, atraktif, dan dapat mengena;
2) Menanamkan nilai-nilai Bela Negara dan memberikan pelatihan kemampuan awal Bela Negara kepada semua golongan masyarakat;
3) Menanggulangi aksi kenakalan remaja yang kini justru mengarah kepada aksi kriminalitas;
4) Mememlihara dan meningkatkan kesediaan dan minat masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi sebagai upaya mengantisipasi kejenuhan masyarakat terhadap proses-proses demokrasi;
5) Mengoptimalkan pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat - termasuk kepada kelompok-kelompok marginal;
6) Mengintensifkan gerakan penanaman cinta produk dalam negeri sebagai upaya menanggulangi ekonomi global yang dapat menggerus kebanggaan terhadap produk dalam negeri jika tidak diintervensi;
7) Masih adanya potensi konflik yang bersumber pada intoleransi terhadap suku, aama, ras dan antar golongan (SARA);
8) Masih tingginya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
9) Meningkatkan partisipasi aktif ormas sehingga ormas dapat benar-benar berperan sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan;
10) Masih adanya kelompok -kelompok masyarakat yang aktivitasnya mengganggu kenyamanan dan ketertiban wilayah;

11) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya deteksi dini, cegah dini, dan antisipasi dini potensi-potensi ancaman, tantangan, habatan, dan gangguan ketertiban wilayah.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Dukungan dana, sarana dan prasarana, serta personil dari Pemerintah Kota Semarang;
2) Koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi yang solid dengan seluruh pemangku wilayah di Kota Semarang;
3) Kemitraan yang terjalin baik dengan seluruh perangkat daerah Kota Semarang;
4) Kemitraan, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan instansi vertikal di daerah;
5) Dukungan yang cukup optimal dari mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
6) Pemanfaatan teknologi guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7) Tersedianya ruang dan kesempatan bagi pelaksanaan inovasi yang menunjang pelayanan perangkat daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu: "**Masih Rendahnya Tingkat Kematangan Praktek Demokrasi Masyarakat**" yang dapat dilihat dari capaian indeks demokrasi yang kian menurun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sbb tabel berikut :

Tabel 2. 8
Capaian indeks demokrasi 2022-2024

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	95,35	95,18	89,72

Pada tahun 2022, capaian indeks demokrasi mencapai angka 95,35 yang berkaitan erat dengan kondisi pemulihan pasca Covid-19 dimana anggaran pendidikan dan kesehatan mendapatkan perhatian lebih sehingga memenuhi batas minimal penganggaran yang diwajibkan. Namun pada tahun 2023, capaian angka indeks demokrasi mengalami penurunan sebesar 0,17 angka indeks – atau sekitar 0,18%- ke angka 95,18. Hal ini disebabkan pada aspek III Lembaga Demokrasi terkait Alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan yang idealnya adalah 40% dari total anggaran Belanja pada APBD Kota Semarang Tahun 2023 hanya dianggarkan sebesar 28,88% total anggaran Belanja pada APBD Kota Semarang Tahun 2023.

Pada tahun 2024, capaian indeks demokrasi kembali mengalami penurunan 5,46 point - atau sekitar 5,74 %- ke angka 89,72 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Hal itu salah satunya disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat penyelenggaraan pesta demokrasi yaitu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPRD, DPD, DPR RI dan Pemilihan Kepala Daerah. Seluruh aspek pada Indeks Demokrasi tahun 2024 mengalami penurunan dimana aspek yang mengalami penurunan signifikan adalah Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga Demokrasi. Penurunan pada aspek kebebasan sipil salah satunya disebabkan oleh terjadinya peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan – yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan agenda penolakan revisi undang-undang Pilkada pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang berakhir ricuh. Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi penurunan angka capaian indeks demokrasi adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang – tercatat sampai dengan bulan Juli 2024 telah terjadi 59 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kota Semarang tergolong dalam lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih tinggi dalam angka kasus kekerasan terhadap perempuan – disusul Demak, Purwokerto, Banyumas, dan Pati.

Masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Rumusan Permasalahan
“Masih Rendahnya Tingkat Kematangan Praktek Demokrasi Masyarakat”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih adanya ancaman terorisme, ekstremisme dan radikalisme, yang dapat mengikis fondasi kebersamaan dan persatuan	akar masalah 1 : Penanaman nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat belum optimal
		akar masalah 2: maraknya berita hoax yang beredar dikalangan masyarakat
		akar masalah: 3

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		masih adanya kenakalan remaja di wilayah Kota Semarang
		akar masalah 4 : belum optimalnya penanaman dan penerapan nilai Bela Negara
2	masih adanya ancaman terhadap stabilitas ekonomi, sosial, budaya, dan agama di masyarakat	akar masalah 1 : kurang intensifnya gerakan penanaman cinta produk dalam negeri
		akar masalah 2 : kurang optimalnya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi kerakyatan
		akar masalah 3 : kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang esensi toleransi terhadap perbedaan
		akar masalah 4: Belum optimalnya upaya pembinaan dan pendampingan pada kelompok masyarakat yang rawan terhadap paparan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
3	belum optimalnya partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	Akar Masalah 1 : masih rendahnya tingkat kemandirian ormas
		akar masalah 2 : belum berkelanjutannya program kerja ormas
		akar masalah 3 : masih adanya ormas-ormas yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah
		akar masalah 4 : kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap ormas
		akar masalah 5 : rendahnya kualitas pendataan ormas
4	masih adanya potensi ATHG terhadap kondusifitas wilayah	akar masalah 1: masih adanya konflik yang terjadi kelompok masyarakat terkait isu SARA
		akar masalah 2: kurang optimalnya cegah dini dan kewaspadaan dini terhadap ATHG
5	Pendidikan politik belum menyentuh akar pemahaman ideologi, etika politik, dan demokrasi substansial	akar masalah 1: rendahnya partisipasi aktif Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dalam proses politik
		akar masalah 2: belum optimalnya pendidikan politik di seluruh elemen masyarakat
6	Kurang Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Akar Masalah Perencanaan: masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi
		Akar Masalah Umpeg: belum optimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang diberikan kepada pegawai Badan Kesbangpol
		Akar Masalah Keuangan: Kurangnya pemahaman dan penguasaan teknis pengelolaan keuangan sesuai regulasi terbaru di kalangan aparatur

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Penanaman nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat belum optimal;
2. Maraknya berita hoax yang beredar dikalangan masyarakat;
3. Masih adanya kenakalan remaja di wilayah Kota Semarang;

4. Belum optimalnya penanaman dan penerapan nilai Bela Negara;
5. Kurang intensifnya gerakan penanaman cinta produk dalam negeri;
6. Kurang optimalnya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi kerakyatan;
7. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang esensi toleransi terhadap perbedaan;
8. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pendampingan pada kelompok masyarakat yang rawan terhadap paparan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
9. Masih rendahnya tingkat kemandirian ormas;
10. Belum berkelanjutannya program kerja ormas;
11. Masih adanya ormas-ormas yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah;
12. Kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap ormas;
13. Rendahnya kualitas pendataan ormas;
14. Masih adanya konflik yang terjadi kelompok masyarakat terkait isu SARA;
15. Kurang optimalnya cegah dini dan kewaspadaan dini terhadap ATHG;
16. Rendahnya partisipasi aktif Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dalam proses politik;
17. Belum optimalnya pendidikan politik di seluruh elemen masyarakat;
18. Masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi;
19. Belum optimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang diberikan kepada pegawai Badan Kesbangpol;
20. Kurangnya pemahaman dan penguasaan teknis pengelolaan keuangan sesuai regulasi terbaru di kalangan aparatur.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029, memuat visi-misi pembangunan nasional yang menjadi cita-cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi acuan pembangunan nasional jangka waktu 5 tahun dari 2025 sampai 2029. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang mempedomani pada visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, secara tidak langsung juga mempedomani visi-misi RPJMN 2025-2029 dalam penyusunan untuk mendukung visi **"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"** dengan 8 misi sebagai berikut:

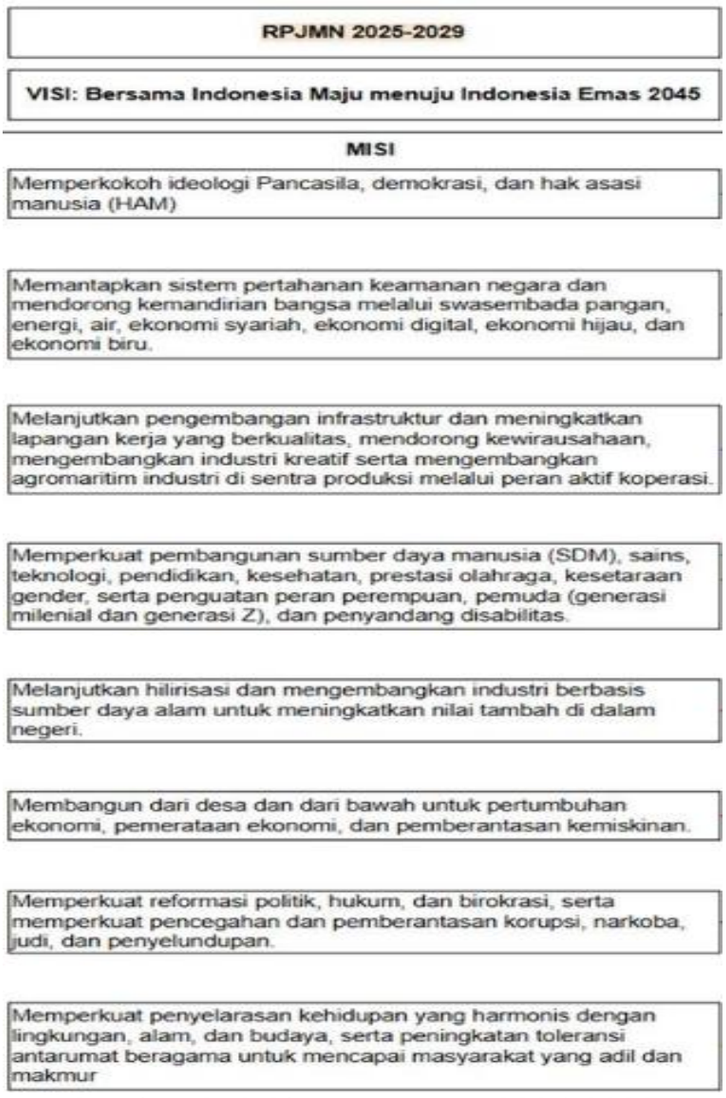

Gambar 2. 2 Skema RPJMN 2025-2029

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mendukung pencapaian misi pertama RPJMN 2025-2029, yaitu **"Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)"**

b. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Berdasarkan visi dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dan mempertimbangkan evaluasi RPJMD Kota Semarang periode sebelumnya, serta mempertimbangkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025- 2029, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB,

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan,kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi.

Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas ekspor- impor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup aka terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

- Berkeadilan Sosial

  Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

- Lestari

  Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota

Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

- Inklusif

Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman.

Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini,

mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

1. Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
2. Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
3. Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
4. Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi **"Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif"**, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- Misi 1.
  Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

  Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi sekolah swasta gratis, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial rumah inspirasi, dan pendampingan kelompok disabilitas seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang.

- Misi 2.
  Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

- Misi 3.
  Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

  Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program urban farming, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip livability. Akses air bersih dan sanitasi aman dan layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

- Misi 4.
  Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

  Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, bussiness matching dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi

tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

- Misi 5.
  Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

  Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan bus rapid transit (BRT), peremajaan armada BRT secara merata dan proporsional di seluruh koridor, perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

- Misi 6.
  Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

  Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan

program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif bagi wilayah yang berhasil mengelola ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

- Misi 7.
  Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

  Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem e-budgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. Smart city dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pembangunan Kota Semarang 5 (lima) tahun dari 2025 sampai dengan 2029 merupakan perjalanan yang panjang. Terdapat berbagai macam potensi yang perlu dikembangkan maupun isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang harus diatasi yang akan bermunculan secara dinamis selamat periode tersebut. Berbagai kebijakan dan strategi akan diambil Kota Semarang dalam upayanya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Semarang. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Keberhasilan dari semua program pembangunan ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Setiap warga dari individu hingga komunitas memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk memberi masukan, mendukung, menjaga maupun mengevaluasi jalan pembangunan Kota Semarang. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aspek teknis, seperti perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat, integrasi sistem pelayanan publik untuk efisiensi dan transparansi, pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya komunikasi yang transparan dan kerjasama yang solid, setiap tantangan dapat diatasi dan setiap potensi

dapat dikembangkan. Visi dan misi Kota Semarang didukung dengan tagline:

Tabel 2. 10
Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat!	
Bangun Infrastruktur Berkualitas	**H**umanis dalam Melayani
Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan	**E**konomi Inklusif
Ramah Lingkungan	**B**udaya yang Dilestarikan
Sosial Harmonis Tanpa Konflik	**A**ksesibilitas Meningkat
Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin	**T**angguh menghadapi Tantangan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Utamakan Kesejahteraan Bersama	

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. “Meningkatnya kondusifitas wilayah” dengan indikator “Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)”;
2. “Meningkatnya peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” dengan indikator sasaran

"Indeks Kebebasan" yang merupakan bagian dari Indeks Demokrasi ;

3. "Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik" dengan indikator sasaran
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
      Indikator ini diukur dari hasil penilaian terhadap AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja.
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
      Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mendukung pencapaian misi pertama, yaitu "Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian". Secara langsung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Indeks Demokrasi, Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kinerja Ormas.

c. **Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri**

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menyusun Rencana Strategis untuk periode 2025-2029. Renstra ini menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung Visi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Inovatif, dan Kolaboratif (APIK) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi di atas mengandung makna bahwa Ditjen Polpum, sebagai bagian integral dari Kementerian Dalam Negeri, harus mampu merespons tantangan dan dinamika lingkungan

strategis baik internal maupun eksternal. Visi ini dijabarkan melalui empat pilar utama:

- Adaptif
  Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan cepat. Ini menuntut Ditjen Polpum untuk peka dan terbuka dalam menghadapi isu-isu baru, seperti keamanan siber dan pergeseran politik generasi muda, guna menemukan solusi yang efektif.
- Profesional
  Kapasitas untuk mengembangkan kualitas aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan tepat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.
- Inovatif
  Kemampuan untuk melakukan pembaruan dan memanfaatkan teknologi, termasuk pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, guna meningkatkan kinerja dan daya saing.
- Kolaboratif
  Upaya membangun kerja sama yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat, untuk memastikan kebijakan yang selaras dan bermanfaat.

Misi dan Arah Kebijakan Strategis

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut, Ditjen Polpum mengemban Misi utama Kementerian Dalam Negeri, yaitu:
"Memperkuat implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia."

Misi ini secara langsung menjadi penugasan yang harus dikawal oleh Ditjen Polpum. Untuk menerjemahkan misi ini ke dalam tindakan nyata, arah kebijakan dan strategi Ditjen Polpum diselaraskan dengan 8 (delapan) butir Asta Cita yang menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Ditjen Polpum memiliki peran sentral dalam mendukung Asta Cita 1, 7, dan 8.

1. Arah Kebijakan 1
   Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (Asta Cita 1)
   Fokus utama adalah penguatan fondasi kebangsaan dan kehidupan demokrasi yang substansial.
2. Arah Kebijakan 2
   Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan Korupsi dan Narkoba (Asta Cita 7)
   Arah kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan sistem politik yang sehat. Upaya yang akan dilaksanakan antara lain:
   - Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

- Peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini terhadap potensi ancaman.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan strategis di bidang politik dalam negeri.
- Fasilitasi penguatan tata kelola partai politik, termasuk pemberian pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol.
- Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik secara akuntabel.
- Pengembangan program literasi politik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

3. Arah Kebijakan 3
   Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya (Asta Cita 8)
   Fokus pada pemeliharaan harmoni sosial dan kerukunan sebagai modal dasar pembangunan. Langkah strategis yang ditempuh adalah:
   - Fasilitasi pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama, penghayat kepercayaan, ras, dan golongan lainnya.

Sasaran dan Indikator Kinerja Strategis

Untuk memastikan pencapaian misi dan arah kebijakan di atas, Ditjen Polpum menetapkan sasaran strategis yang terukur. Sasaran Strategis Utama:

"Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional"

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut:

- **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi**
  Mengukur tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi.
- **Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM)**
  Mengukur kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.

Selanjutnya, sasaran tersebut diturunkan ke dalam sasaran program dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang lebih spesifik:

- **Persentase Provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berkategori "Tinggi"**, dengan target meningkat dari 18 daerah pada tahun 2025 menjadi 23 daerah pada tahun 2029.
- **Indeks Kinerja Ormas**, dengan target nilai meningkat dari 67 pada tahun 2025 menjadi 71 pada tahun 2029.
- **Indeks Harmoni Indonesia**, dengan target nilai meningkat dari 6,5 pada tahun 2025 menjadi 6,9 pada tahun 2029.
- **Indeks Kewaspadaan Nasional**, dengan target nilai meningkat dari 75 pada tahun 2025 menjadi 80 pada tahun 2029.

Rencana Strategis Ditjen Polpum 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif dan visioner untuk mengawal stabilitas politik dan pemerintahan umum di Indonesia. Keberhasilan implementasi Renstra ini tidak hanya bergantung pada komitmen internal Ditjen Polpum, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Dengan berpedoman pada Renstra ini, Ditjen Polpum diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan kualitas demokrasi, dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

d. **Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah **Indeks Ketahanan Ipoleksosbud.**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya stabilitas politik dengan indikator **"indeks ketahanan politik";**
- Meningkatnya ketahanan bangsa dengan indikator **"indeks harmoni Indonesia"**

e. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ***tidak dapat*** mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ***tidak memiliki*** indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

f. **Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna

mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak dapat mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS, isu yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah terkait "***Tata kelola kelembagaan***"

Tabel 2.8.
Tema Isu KLHS terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Tata Kelola Kelembagaan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penataan manajemen SDM berbasis kompetensi, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan partisipatif.

Sumber : KLHS RPJD Kota Semarang 2025-2029

g. **Telaahan Pengarusatamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan sementara kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Pengarusutamaan Gender berasaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipatif, kesetaraan, sinergitas, non diskriminatif.

Pengarusatamaan Gender yang dibangun dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bertujuan untuk :

1) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam proses politik;
2) Melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan dan adiktif lainnya;
3) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam upaya bela negara;
4) Meningkatkan partisipasi aktif kaum perempuan dalam kelembagaan demokrasi;
5) Meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini, cegah dini, dan antisipasi dini potensi kerawanan sosial politik di wilayahnya masing-masing;
6) Meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan konflik dan pembangunan non-material

h. **Telaahan Penyelenggaraan Kota Layak Anak**

Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, hak-hak anak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, Swasta dan Masyarakat dapat meliputi:

1) hak sipil dan kebebasan;
2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4) hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5) hak perlindungan khusus.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang melaksanakan upaya pemenuhan hak kelima, yaitu "***hak perlindungan khusus***", khususnya pada perlindungan terhadap anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya memperoleh layanan sosialisasi dan edukasi.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang juga melaksanakan edukasi kepada generasi muda sebagai upaya pencegahan terhadap paparan paham radikalisme dan terorisme.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2. 11
Isu Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan Bakesbangpol	Permasalahan Bakesbangpol	Isu KLHS yang Relevan dengan Bakesbangpol	Target			Isu Strategis Bakesbangpol
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kemitraan dengan berbagai forum kemasyarakatan dan instansi vertikal di daerah Kemitraan dengan	Masih adanya ancaman terorisme, ekstremisme dan radikalisme, yang dapat mengikis fondasi kebersamaan dan persatuan	Perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penataan manajemen SDM berbasis kompetensi,	Batas wilayah antar negara kian nisbi akibat pengaruh globalisasi sehingga memicu ancaman ideologi negara, kedaulatan	Rendahnya kualitas sumber daya manusia Geopolitik dan geoekonomi	Nilai budaya dan karakter masyarakat yang terancam luntur Masyarakat Kota	Stabilitas Wilayah Optimalisasi peran forum kemasyarakatan dan instansi vertikal di daerah

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan Bakesbangpol	Permasalahan Bakesbangpol	Isu KLHS yang Relevan dengan Bakesbangpol	Target			Isu Strategis Bakesbangpol
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
organisasi kemasyarakatan Dukungan anggaran dan personil dari Pemerintah Kota Semarang	masih adanya ancaman terhadap stabilitas ekonomi, sosial, budaya, dan agama di masyarakat belum optimalnya partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan masih adanya potensi ATHG terhadap kondusifitas wilayah Kurang Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan partisipatif.	dan kondusifitas wilayah Ancaman perang dunia ketiga yang dapat memicu kerawanan wilayah akibat kepanikan massal Perubahan iklim yang memicu penurunan hasil-hasil bumi Persaingan Sumber Daya Alam	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Semarang belum memiliki kemampuan yang optimal untuk mengakomodir dan menghargai perbedaan secara merata sehingga inklusivitas Kota Semarang belum tinggi Masih tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika	Kondusivitas Wilayah Iklim Politik yang Kondusif Penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penataan manajemen SDM berbasis kompetensi, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan partisipatif.

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029, visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- ***Meningkatnya peran masyarakat dalam demokrasi***

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya kondusifitas wilayah
- Meningkatnya peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif	Meningkatnya peran masyarakat dalam demokrasi		Indeks Demokrasi	angka	85,36	85,86	86,24	86,61	86,86	86,99	
		Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan)	kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		meningkatnya peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Indeks Kebebasan	Angka	82,00	82,25	82,50	82,75	83,00	83,25	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	80,16	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	88,25	88,50	88,75%	89,00	89,25	89,50	

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2
Tahapan Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan kapasitas dan sistem peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi melalui upaya penerapan kematangan sikap berdemokrasi	Peningkatan kapasitas dan sistem peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi melalui upaya penerapan kematangan sikap berdemokrasi	Penguatan kapasitas dan sistem peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi melalui upaya penerapan kematangan sikap berdemokrasi	Akselerasi kapasitas dan sistem peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi melalui upaya penerapan kematangan sikap berdemokrasi	Perwujudan efektivitas manajemen peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi melalui upaya penerapan kematangan sikap berdemokrasi

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi politik	Mendorong pengembangan pendidikan karakter dan penguatan nilai kebhinekaan dan toleransi	Peningkatan pendidikan politik dan penyediaan "ruang" untuk praktik politik santun	
			Optimalisasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan pada seluruh elemen masyarakat	
			Memberikan pendidikan karakter kepada masyarakat yang berlandaskan pancasila melalui media sosial	
			Memberikan pelatihan dan pendidikan kesadaran bela negara kepada generasi muda	
			Meningkatkan pemahaman dan penerapan bela negara dalam kehidupan bermasyarakat	
			Mengintensifkan gerakan penanaman cinta produk dalam negeri	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			Mengoptimalkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi kerakyatan	
			Meningkatkan upaya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang esensi toleransi terhadap perbedaan	
			Mengoptimalkan upaya pembinaan dan pendampingan pada kelompok masyarakat yang rawan terhadap paparan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya	
			Meningkatkan kemandirian ormas melalui pendidikan dan pelatihan	
			Pemberian dukungan terhadap kegiatan ormas melalui hibah maupun fasilitasi kegiatan	
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ormas dengan pelibatan instansi vertikal di daerah	
			Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap ormas	
			Peningkatan kualitas pendataan ormas	
			Meningkatkan pemehaman tentang penanganan konflik sosial melalui upaya preemtif dan preventif dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat	
			Peningkatan kemampuan cegah dini dan deteksi dini	

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			terhadap ancaman ATHG	
			Meningkatkan peran serta Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dalam kehidupan demokrasi substansial di segenap aspek kehidupan	
			Meningkatkan peran serta segenap elemen masyarakat dalam kehidupan demokrasi substansial di segenap aspek kehidupan	
			Mendorong keterlibatan aktif seluruh unit kerja dalam proses perencanaan dan pelaporan	
			Melakukan penataan struktur organisasi dan distribusi pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan kompetensi	
			Menyediakan pedoman teknis dan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan kepada seluruh aparatur.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
Meningkatkan lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif	**Meningkatnya peran masyarakat dalam demokrasi**				**Indeks Demokrasi**		**Kepala Badan**
		Meningkatnya kondusifitas wilayah			**Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)**		**Kepala Badan**
			Meningkatnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara		**Indeks Aktualisasi Pancasila**	**8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**
				Meningkatnya penerapan nilai-nilai persatuan Indonesia di masyarakat	**Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai persatuan Indonesia**	**8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**
				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				Meningkatnya penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di masyarakat	**Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab**	**8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa**
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
			Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah		**Indeks Harmoni Indonesia**	**8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**
				meningkatnya partisipasi ormas keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	**Persentase Ormas Keagamaan yang aktif**	**8.01.05.2.01 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**Subkoordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**
				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
				Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di BidangKetahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
			Meningkatnya kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri		**Indeks Kewaspadaan Nasional**	**8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**
				Meningkatnya kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	**Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam**	**8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**
				Tersusunnya Program di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas iKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
				Meningkatnya kemampuan deteksi dini, cegah dini, dan antisipasi dini serta kewaspadan terhadap potensi konflik di masyarakat	**Prosentase mitigasi konflik SARA**	**8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Sub Koordinator Penanganan Konflik**
				Tersusunnya Kebijakan di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Daerah			
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		Meningkatnya peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara			**Indeks Kebebasan**		**Kepala Badan**
			Meningkatnya kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan		**Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan**	**8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Kepala Bidang Politik Dalam Negeri**
				Meningkatnya pengawasan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan	**Jumlah laporan dan usulan masyarakat terkait pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**8.01.03.2.01 perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik**	**Sub Koordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi**
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada	**Partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada**		
				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala	Staf Bidang Politik Dalam Negeri

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Staf Bidang Politik Dalam Negeri
				Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan publik	**Angka partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik**	**8.01.03.2.01 perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik**	**Sub Koordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik**
				Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Staf Bidang Politik Dalam Negeri

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Staf Bidang Politik Dalam Negeri
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Staf Bidang Politik Dalam Negeri
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah		**Indeks Kinerja Ormas**	**8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**
				Meningkatnya Partisipasi Organsasi Kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	**Persentase Ormas Aktif**	**8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan**
				Tersusunnya Program Kerja di bidang Pendaftaran	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas,	8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran	Staf Bidang Ketahanan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
				Tersusunnya Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
				Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
				Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daera	8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, PengawasanOrmas dan Ormas Asing di Daerah	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
				Terlaksananya Monitoring Evaluasidan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		**Kepala Badan**
					Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		**Kepala Badan**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sekretaris**
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan**	**8.01.01.2.01 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.**	**Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi**
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				TersedianyaDokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD danLaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Staf Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Staf Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan**	**8.01.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.01.01.2.02.0002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Subbagian Keuangan dan Barang Milik

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
							Daerah
					Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sekretaris**
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai layanan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selesai ditindaklanjuti**	**8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan**	**8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun indikator dari masing-masing program tsb diatas adalah sebagai berikut:

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan indikator program "Indeks Aktualisasi Pancasila", yang tersusun dari indikator kandidat sebagai berikut :
   a. **Indikator kandidat : SILA KE-1 KETUHANAN YANG MAHA ESA,** dengan indikator :
      1. Persentase penduduk usia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang mengikuti kegiatan keagamaan dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekitar tempat tinggal dalam tiga bulan terakhir;
      2. Persentase rumah tangga yang setuju adanya aturan tertulis yang melindungi kebebasan masyarakat dalam menjalankan agama dan kepercayaannya;
      3. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan kepercayaan lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal;
      4. Persentase rumah tangga yang pernah mengalami pembatasan, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan terkait dengan ajaran agama dan kepercayaan;
      5. Persentase rumah tangga yang pernah mengalami pembatasan, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan terkait dengan ajaran agama dan kepercayaan;
      6. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama.
   b. **Indikator kandidat : SILA KE-2 KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB,** dengan indikator :
      1. Persentase rumah tangga yang setuju adanya aturan tertulis yang mengatur kesetaraan dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya;
      2. Persentase rumah tangga yang pernah mengalami diskriminasi dalam hal gender, etnis dan kelompok rentan lainnya;
      3. Rasio angka partisipasi sekolah (aps) penduduk usia 7 (tujuh) s.d 18 (delapan belas) tahun yang menyandang disabilitas terhadap non disabilitas;
      4. Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, atau lainnya.
   c. **Indikator kandidat : SILA KE-3 PERSATUAN INDONESIA,** dengan indikator :
      1. Persentase rumah tangga yang mengibarkan/ memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dalam 1 (satu) tahun terakhir;
      2. Persentase rumah tangga yang setuju jika dipimpin oleh pemimpin (ketua/kepala) yang berbeda suku bangsa, dan/atau berbeda agama atau kepercayaan;
      3. Persentase rumah tangga yang pernah menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat/tradisi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
      4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak;

5. Persentase rumah tangga melakukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

d. Indikator kandidat : SILA KE-4 KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN, dengan indikator :

1. Persentase penduduk usia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah;
2. Persentase desa yang badan permusyawaratan desa/lembaga musyawarah kelurahan melakukan kegiatan musyawarah desa/kelurahan minimal 4 (empat) kali selama setahun;
3. Persentase rumah tangga yang mempunyai hak pilih dan menggunakan hak pilihnya;
4. Persentase rumah tangga yang di lingkungan sekitar tempat tinggalnya mengambil keputusan dengan cara musyawarah.

e. Indikator kandidat : SILA KE-5 KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, dengan indikator :

1. Persentase desa yang memiliki industri mikro dan kecil;
2. Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri;
3. Persentase desa dengan produk unggulan pangan;
4. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (JKN, BPJS, dan/atau Jamkesda);
5. Persentase desa yang melakukan kegiatan penanaman/ pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya oleh masyarakat desa/kelurahan selama 3 (tiga) tahun terakhir;

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan indikator program "Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan" yang merupakan bagian dari Indeks Demokrasi.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan indikator program "Indeks Kinerja Ormas", dengan variabel pengukuran sbb :

Variabel Sumber Daya

a. Kepemilikan Kantor
   1. Kantor milik sendiri
   2. Kantor sewa/ perjanjian
   3. Kantor berada di rumah tempat tinggal pengguna
   4. Tidak mempunyai kantor

b. Karyawan
   1. Mempunyai karyawan tetap (penuh waktu) yang terikat dengan perjanjian kerja
   2. Pengurus merangkap karyawan yang bekerja penuh waktu berdasarkan keputusan organisasi
   3. Mempunyai karyawan tidak penuh waktu berdasarkan keputusan organisasi, namun memiliki waktu kerja yang terjadwal rutin
   4. Tidak memiliki karyawan

c. Sumber Pendapatan
    1. Mempunyai anggaran tetap bersumber dari donor tetap, usaha tetap, atau dana abadi
    2. Mempunyai sumber anggaran dari pengurus secara tetap
    3. Mempunyai sumber anggaran dari sumber yang tidak tetap
    4. Tidak mempunyai sumber anggaran

d. Akuntansi Keuangan
    1. Laporan keuangan disusun dan diaudit setiap tahun
    2. Laporan keuangan disusun setiap tahun tapi tidak diaudit
    3. Mempunyai catatan keuangan berupa pembukuan yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran secara rutin
    4. Tidak ada laporan dan catatan keuangan

Variabel Program

a. Rencana Program
    1. Mempunyai rencana program jangka menengah dan tahunan, dimana sebagian besar rencana program terealisasi (lebih dari 50% rencana kegiatan terealisasi)
    2. Mempunyai rencana program namun sebagian besar tidak sesuai dengan realisasi program (kurang dari atau sama dengan 50% rencana kegiatan terealisasi)
    3. Rencana program disusun secara insidentil pada saat kegiatan akan dilaksanakan
    4. Tidak mempunyai rencana program
b. Pelaksanaan Program
    1. Mempunyai kegiatan yang dilaksanakan secara rutin minimal setiap bulan
    2. Mempunyai kegiatan rutin dan terjadwal pada saat tertentu dalam satu tahun
    3. Mempunyai kegiatan insidentil dalam satu tahun
    4. Tidak mempunyai kegiatan dalam satu tahun terakhir
c. Manfaat Program Kegiatan
    1. Sasaran penerima manfaat program/ kegiatan adalah sejumlah masyarakat lintas negara
    2. Sasaran penerima manfaat program/ kegiatan adalah sejumlah masyarakat pada lebih dari satu provinsi
    3. Sasaran penerima manfaat program/ kegiatan adalah sejumlah masyarakat pada lebih dari satu kabupaten/ kota dalam satu provinsi

Sasaran penerima manfaat program/ kegiatan adalah sejumlah masyarakat lebih dari satu kecamatan dalam satu kabupaten/ kota

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan indikator program “Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)”. Adapun dimensi dari Indeks Harmoni Indonesia antara lain:

a. Dimensi Harmoni Ekonomi, dengan variabel :
    1. Ketersediaan dan aksesibilitas pangan
    2. Keadilan dan kesejahteraan
b. Dimensi Harmoni Sosial, dengan variabel :
    1. Pluralisme
    2. Pendidikan
    3. Kewarganegaraan

c. Dimensi Harmoni Budaya/ Kultural, dengan variabel :
    1. Akulturasi
    2. Keberagaman
    3. Kearifan Lokal

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Dengan indikator program "Indeks Kewaspadaan Nasional". Indeks Kewaspadaan Nasional adalah ukuran untuk mengidentifikasi kualitas kesiapan dan kesiagaan untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk ancaman ataupun potensi ancaman keutuhan NKRI, dengan dimensi sbb:
    a. Dimensi Konflik Pemerintahan, dengan variabel :
        1. Konflik pemerintahan
        2. Penanganan konflik
        3. Partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik
        4. Meredam konflik
    b. Dimensi Forkopimda, dengan variabel :
        1. Hubungan kelembagaan
        2. Nasionalisme
    c. Dimensi Kewaspadaan Informasi Media, dengan variabel :
        1. Literasi Informasi
        2. Media
    d. Dimensi Kewaspadaan Dini, dengan variabel :
        1. Toleransi
        2. Pencegahan
        3. Cinta tanah air
    e. Dimensi Pengawasan Orang Asing, dengan variabel :
        1. Ancaman asing
        2. Pengungsi

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi dan menjamin semua kelompok agama dan budaya untuk bebas menjalankan ibadah dan praktek budayanya sesuai dengan ideologi pancasila;
2. Peningkatan peran organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara	Sub Kegiatan Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	
			Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	
			Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purna Paskibraka	
			Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	
			Sub Kegiatan Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	
			Kegiatan Penguatan dan Implementasi Bela Negara	
			Penyusunan/ Perubahan rencana aksi bela negara di daerah	
			Sosialisasi/diseminasi/ pendidikan dan pelatihan bela negara, serta kegiatan publikasi lainnya	
			Koordinasi penguatan dan implementasi Bela Negara oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan pihak lainnya	
			Pelaksanaan Hari Bela Negara	
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	
			Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di bidang pendidikan politik, etika	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;	
			Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, PengawasanOrmas dan Ormas Asing di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
			Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakandi BidangKetahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang terdapat pada lampiran

Tabel 4. 3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
8.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**30.138.297.361**		**33.390.939.362**		**34.806.640.563**		**35.066.684.757**		**35.680.075.155**
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**30.138.297.361**		**33.390.939.362**		**34.806.640.563**		**35.066.684.757**		**35.680.075.155**
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					**5.262.242.766**		**5.818.965.029**		**6.061.276.471**		**6.105.785.640**		**6.210.773.551**
Meningkatnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	**Indeks Aktualisasi Pancasila**	**Angka**	**74.75**	**75.25**	**5.262.242.766**	**75.5**	**5.818.965.029**	**75.75**	**6.061.276.471**	**78**	**6.105.785.640**	**78.25**	**6.210.773.551**
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					**5.262.242.766**		**5.818.965.029**		**6.061.276.471**		**6.105.785.640**		**6.210.773.551**
Meningkatnya Rumah Tangga yang mengamalkan nilai persatuan Indonesia	**Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai persatuan Indonesia**	**%**	**-**	**78**	**2.332.242.766**	**78,25**	**2.213.965.029**	**78,5**	**2.801.276.471**	**78,75**	**2.740.785.640**	**79**	**2.810.773.551**
8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					1.232.242.766		971.965.029		1.260.276.471		1.180.785.640		1.224.773.551
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	50	29	1.232.242.766	29	971.965.029	30	1.260.276.471	29	1.180.785.640	29	1.224.773.551
8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					565.000.000		670.000.000		925.000.000		930.000.000		940.000.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	28	3	565.000.000	3	670.000.000	3	925.000.000	3	930.000.000	3	940.000.000
8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					180.000.000		192.000.000		201.000.000		210.000.000		216.000.000
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	2.736	1800	180.000.000	1950	192.000.000	2100	201.000.000	2100	210.000.000	2100	216.000.000
8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					125.000.000		135.000.000		145.000.000		155.000.000		160.000.000
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	180	280	125.000.000	320	135.000.000	360	145.000.000	400	155.000.000	400	160.000.000
8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					230.000.000		245.000.000		270.000.000		265.000.000		270.000.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	7	230.000.000	7	245.000.000	7	270.000.000	7	265.000.000	7	270.000.000
Meningkatnya rumah tangga yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab	**Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab**	**%**	**-**	**73**	**2.930.000.000**	**74**	**3.605.000.000**	**75**	**3.260.000.000**	**76**	**3.365.000.000**	**77**	**3.400.000.000**
8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		120.000.000
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	0	300	110.000.000	300	110.000.000	300	110.000.000	300	110.000.000	300	120.000.000
8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka					490.000.000		1.085.000.000		560.000.000		625.000.000		570.000.000
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	0	23	490.000.000	23	1.085.000.000	25	560.000.000	26	625.000.000	25	570.000.000
8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka					1.750.000.000		1.800.000.000		1.950.000.000		1.960.000.000		1.970.000.000
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	0	27	1.750.000.000	27	1.800.000.000	27	1.950.000.000	27	1.960.000.000	27	1.970.000.000
8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila					50.000.000		70.000.000		90.000.000		110.000.000		120.000.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	0	1	50.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000
8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	0	11	500.000.000	11	500.000.000	11	500.000.000	11	500.000.000	11	550.000.000
8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	0	27	30.000.000	27	40.000.000	27	50.000.000	27	60.000.000	27	70.000.000
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					**6.712.950.010**		**7.423.150.752**		**7.732.263.173**		**7.789.042.732**		**7.922.973.954**
Meningkatnya kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	**Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan**	**Angka**	**59,75**	**60.25**	**6.712.950.010**	**60.5**	**7.423.150.752**	**60.75**	**7.732.263.173**	**61**	**7.789.042.732**	**61,25**	**7.922.973.954**
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					**6.712.950.010**		**7.423.150.752**		**7.732.263.173**		**7.789.042.732**		**7.922.973.954**
Meningkatnya pengawasan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan	**Jumlah laporan dan usulan masyarakat terkait pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**Laporan dan usulan**	**10250**	**10500**	**780.000.000**	**10600**	**1.340.000.000**	**10700**	**1.395.000.000**	**11000**	**1.420.000.000**	**11100**	**1.180.000.000**
	Partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada	**%**	**71**							**71,5**			

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					700.000.000		750.000.000		800.000.000		820.000.000		750.000.000
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	122	35	700.000.000	40	750.000.000	50	800.000.000	55	820.000.000	35	750.000.000
8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					80.000.000		590.000.000		595.000.000		600.000.000		430.000.000
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	810	75	80.000.000	1075	590.000.000	1275	595.000.000	1375	600.000.000	900	430.000.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan publik	**Angka partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik**	**Nilai**	**-**	**58**	**5.886.650.010**	**58,25**	**6.535.850.752**	**58,50**	**6.659.213.173**	**58,75**	**6.689.042.732**	**59**	**7.003.673.954**

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					5.776.650.010		5.910.850.752		6.022.213.173		6.039.042.732		6.503.673.954
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	10	5.776.650.010	10	5.910.850.752	10	6.022.213.173	10	6.039.042.732	10	6.503.673.954
8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					30.000.000		35.000.000		42.000.000		50.000.000		70.000.000
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	82	40	30.000.000	40	35.000.000	40	42.000.000	40	50.000.000	50	70.000.000
8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala					126.300.000		137.300.000		273.050.000		280.000.000		169.300.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	48	115	126.300.000	115	137.300.000	160	273.050.000	165	280.000.000	115	169.300.000
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					**2.739.712.872**		**3.029.562.507**		**3.155.718.560**		**3.178.891.635**		**3.233.552.118**
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah	**Indeks Kinerja Ormas**	**Angka**	**65.05**	**65.30**	**2.739.712.872**	**65.50**	**3.029.562.507**	**65.70**	**3.155.718.560**	**65.90**	**3.178.891.635**	**66,1**	**3.233.552.118**
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					**2.739.712.872**		**3.029.562.507**		**3.155.718.560**		**3.178.891.635**		**3.233.552.118**
Meningkatnya Partisipasi Organsasi Kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	**Persentase Ormas Aktif**	**%**	**54**	**55,6**	**2.739.712.872**	**55,7**	**3.029.562.507**	**55,8**	**3.155.718.560**	**55,9**	**3.178.891.635**	**56**	**3.233.552.118**
8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					1.623.000.000		1.733.000.000		1.823.000.000		1.823.891.635		1.863.000.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Tersusunnya Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	61	21	1.623.000.000	21	1.733.000.000	21	1.823.000.000	21	1.823.891.635	21	1.863.000.000
8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					225.000.000		250.000.000		275.000.000		280.000.000		290.000.000
Tersusunnya Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	19	5	225.000.000	5	250.000.000	5	275.000.000	8	280.000.000	8	290.000.000
8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					629.712.872		765.562.507		762.718.560		765.000.000		765.552.118
Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	730	400	629.712.872	350	765.562.507	580	762.718.560	400	765.000.000	500	765.552.118
8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	0	15	135.000.000	15	135.000.000	15	135.000.000	15	135.000.000	15	135.000.000
8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					127.000.000		146.000.000		160.000.000		175.000.000		180.000.000
Terlaksananya Monitoring Evaluasidan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	62	40	127.000.000	45	146.000.000	50	160.000.000	55	175.000.000	60	180.000.000
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					**2.980.183.735**		**3.295.474.135**		**3.432.703.194**		**3.457.910.222**		**3.517.368.380**
Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah	**Indeks Harmoni Indonesia**	**Angka**		**6,1**	**2.980.183.735**	**6,2**	**3.295.474.135**	**6,3**	**3.432.703.194**	**6,4**	**3.457.910.222**	**6,5**	**3.517.368.380**
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					**2.980.183.735**		**3.295.474.135**		**3.432.703.194**		**3.457.910.222**		**3.517.368.380**
meningkatnya partisipasi ormas keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	**Persentase aktif Ormas Keagamaan**	**%**	**50**	**54**	**2.980.183.735**	**58**	**3.295.474.135**	**62**	**3.432.703.194**	**64**	**3.457.910.222**	**66**	**3.517.368.380**
8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					1.578.183.735		1.766.274.135		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	20	10	1.578.183.735	11	1.766.274.135	12	1.850.000.000	12	1.850.000.000	12	1.850.000.000
8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					250.000.000		275.000.000		302.500.000		322.750.000		366.025.000
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	40	300	250.000.000	320	275.000.000	340	302.500.000	360	322.750.000	380	366.025.000
8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					902.000.000		1.004.200.000		1.030.203.194		1.035.160.222		1.051.343.380

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	150	1.500	902.000.000	1.640	1.004.200.000	1.740	1.030.203.194	1.910	1.035.160.222	1.910	1.051.343.380
8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	3	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					**3.938.469.152**		**4.355.141.958**		**4.536.497.358**		**4.569.809.768**		**4.648.386.844**
Meningkatnya kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri	**Indeks Kewaspadaan Nasional**	**Angka**	**76**	**77**	**3.938.469.152**	**78**	**4.355.141.958**	**79**	**4.536.497.358**	**80**	**4.569.809.768**	**81**	**4.648.386.844**
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					**3.938.469.152**		**4.355.141.958**		**4.536.497.358**		**4.569.809.768**		**4.648.386.844**
Meningkatnya kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	**Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam**	**%**	**95.45**	**95,65**	**1.431.069.152**	**95,7**	**1.607.741.958**	**95,75**	**1.727.550.000**	**95,8**	**1.749.809.768**	**95,85**	**1.815.886.844**

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					180.000.000		247.191.958		260.000.000		270.000.000		280.000.000
Tersusunnya Program di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	-	11	180.000.000	15	247.191.958	16	260.000.000	16	270.000.000	16	280.000.000
8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					961.019.152		1.030.500.000		1.087.500.000		1.090.000.000		1.140.836.844
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	679	1485	961.019.152	1550	1.030.500.000	1600	1.087.500.000	1650	1.090.000.000	1950	1.140.836.844

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					290.050.000		330.050.000		380.050.000		389.809.768		395.050.000
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas iKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	399	401	290.050.000	401	330.050.000	402	380.050.000	402	389.809.768	402	395.050.000
Meningkatnya kemampuan deteksi dini, cegah dini, dan antisipasi dini serta kewaspadan terhadap potensi konflik di masyarakat	**Prosentase mitigasi konflik SARA**	**%**	**75**	**76**	**2.507.400.000**	**77**	**2.747.400.000**	**78**	**2.808.947.358**	**79**	**2.820.000.000**	**80**	**2.832.500.000**
8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					370.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Tersusunnya Kebijakan di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	-	16	370.000.000	21	500.000.000	21	550.000.000	21	550.000.000	21	550.000.000
8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					337.500.000		387.500.000		397.500.000		400.000.000		402.500.000
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5017	385	337.500.000	385	387.500.000	455	397.500.000	455	400.000.000	455	402.500.000
8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					1.799.900.000		1.859.900.000		1.861.447.358		1.870.000.000		1.880.000.000
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	25	14	1.799.900.000	14	1.859.900.000	14	1.861.447.358	14	1.870.000.000	14	1.880.000.000
8.01.01 . PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**8.504.738.826**		**9.468.644.981**		**9.888.181.807**		**9.965.244.760**		**10.147.020.308**

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkualitas**	**%**	**100**	**100**	**8.504.738.826**	**100**	**9.468.644.981**	**100**	**9.888.181.807**	**100**	**9.965.244.760**	**100**	**10.147.020.308**
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**67.000.000**		**67.700.000**		**68.400.000**		**119.800.000**		**120.400.000**
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan**	**%**	**100**	**100**	**67.000.000**	**100**	**67.700.000**	**100**	**68.400.000**	**100**	**119.800.000**	**100**	**120.400.000**
8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.000.000		1.100.000		1.200.000		52.000.000		52.000.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	1.000.000	3	1.100.000	3	1.200.000	3	52.000.000	5	52.000.000
8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					3.700.000		3.800.000		3.900.000		4.000.000		4.100.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1	3.700.000	1	3.800.000	1	3.900.000	1	4.000.000	1	4.100.000
8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					4.400.000		4.500.000		4.600.000		4.700.000		4.800.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4.400.000	1	4.500.000	1	4.600.000	1	4.700.000	1	4.800.000
8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.800.000		2.900.000		3.000.000		3.100.000		3.200.000
Tersediany Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	1	2.800.000	1	2.900.000	1	3.000.000	1	3.100.000	1	3.200.000
8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					3.400.000		3.500.000		3.600.000		3.700.000		3.800.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.400.000	1	3.500.000	1	3.600.000	1	3.700.000	1	3.800.000
8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					700.000		800.000		900.000		1.000.000		1.100.000
TersedianyaLaporanCapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporanCapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	1	1	700.000	1	800.000	1	900.000	1	1.000.000	1	1.100.000
8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000		1.100.000		1.200.000		1.300.000		1.400.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.300.000	1	1.400.000
8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Laporan	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
8.01.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**6.861.436.184**		**7.189.627.993**		**7.534.214.393**		**7.896.015.113**		**8.275.890.868**
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	**Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan**	**%**	**100**	**100**	**6.861.436.184**	**100**	**7.189.627.993**	**100**	**7.534.214.393**	**100**	**7.896.015.113**	**100**	**8.275.890.868**
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.557.836.184		6.885.727.993		7.230.014.393		7.591.515.113		7.971.090.868
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40	39	6.557.836.184	39	6.885.727.993	39	7.230.014.393	39	7.591.515.113	39	7.971.090.868
8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					700.000		800.000		900.000		1.000.000		1.100.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	700.000	1	800.000	1	900.000	1	1.000.000	1	1.100.000
8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					2.400.000		2.500.000		2.600.000		2.700.000		2.800.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Dokumen	1	12	2.400.000	12	2.500.000	12	2.600.000	12	2.700.000	12	2.800.000
8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					500.000		600.000		700.000		800.000		900.000
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	500.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**83.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai layanan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Nilai**	**100**	**100**	**83.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**
8.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Orang	-	39	50.000.000	39	100.000.000	39	100.000.000	39	100.000.000	39	100.000.000
8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					33.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	55	55	33.000.000	55	50.000.000	55	50.000.000	55	50.000.000	55	50.000.000
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					**751.600.000**		**1.014.562.988**		**1.087.983.414**		**951.475.647**		**702.885.200**

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**%**	**100**	**100**	**751.600.000**	**100**	**1.014.562.988**	**100**	**1.087.983.414**	**100**	**951.475.647**	**100**	**702.885.200**
8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		5.100.000		5.150.000		5.200.000		5.250.000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.150.000	1	5.200.000	1	5.250.000
8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					63.000.000		63.200.000		63.250.000		63.300.000		63.400.000
T ersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	63.000.000	1	63.200.000	1	63.250.000	1	63.300.000	1	63.400.000
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					66.100.000		66.150.000		66.200.000		66.250.000		66.270.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	66.100.000	1	66.150.000	1	66.200.000	1	66.250.000	1	66.270.000
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.800.000		15.850.000		15.900.000		15.950.000		16.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	1	15.800.000	1	15.850.000	1	15.900.000	1	15.950.000	1	16.000.000
8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.250.000		1.300.000		1.350.000		1.375.000		1.380.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	5	1.250.000	5	1.300.000	5	1.350.000	5	1.375.000	5	1.380.000
8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu					100.150.000		100.240.000		100.250.000		100.270.000		100.285.000
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	104	100	100.150.000	100	100.240.000	100	100.250.000	100	100.270.000	100	100.285.000
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300.300.000		500.340.000		500.370.000		400.000.000		300.300.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	89	50	300.300.000	50	500.340.000	50	500.370.000	50	400.000.000	50	300.300.000

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
8.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					200.000.000		262.382.988		335.513.414		299.130.647		150.000.200
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	5	200.000.000	5	262.382.988	5	335.513.414	5	299.130.647	5	150.000.200
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**120.000.000**		**220.620.000**		**220.900.000**		**121.150.000**		**130.300.000**
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**%**	**100**	**100**	**120.000.000**	**100**	**220.620.000**	**100**	**220.900.000**	**100**	**121.150.000**	**100**	**130.300.000**
8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel					60.000.000		60.120.000		160.200.000		60.250.000		60.300.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	4	60.000.000	5	60.120.000	5	160.200.000	6	60.250.000	6	60.300.000
8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.000.000		160.500.000		60.700.000		60.900.000		70.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	60.000.000	2	160.500.000	2	60.700.000	2	60.900.000	2	70.000.000
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**185.298.642**		**389.380.000**		**389.380.000**		**389.380.000**		**330.040.240**
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selesai ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**185.298.642**	**100**	**389.380.000**	**100**	**389.380.000**	**100**	**389.380.000**	**100**	**330.040.240**
8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	50.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					135.298.642		289.380.000		289.380.000		189.380.000		230.040.240
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	135.298.642	12	289.380.000	12	289.380.000	12	189.380.000	12	230.040.240

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**436.404.000**		**436.754.000**		**437.304.000**		**437.424.000**		**437.504.000**
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**436.404.000**	**100**	**436.754.000**	**100**	**437.304.000**	**100**	**437.424.000**	**100**	**437.504.000**
8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					39.604.000		39.604.000		39.604.000		39.604.000		39.604.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.604.000	1	39.604.000	1	39.604.000	1	39.604.000	1	39.604.000
8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					307.000.000		307.250.000		307.300.000		307.320.000		307.350.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	23	307.000.000	23	307.250.000	23	307.300.000	23	307.320.000	23	307.350.000
8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel					3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5	3.900.000	5	3.900.000	5	3.900.000	5	3.900.000	5	3.900.000
8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.900.000		36.000.000		36.500.000		36.600.000		36.650.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	35.900.000	50	36.000.000	50	36.500.000	50	36.600.000	50	36.650.000
8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Terlaksananya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Demokrasi	angka	85,36	85,86	86,24	86,61	86,86	86,99	
2	Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan)	kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Indeks Kebebasan	Angka	82,00	82,25	82,50	82,75	83,00	83,25	

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Demokrasi	angka	85,36	85,86	86,24	86,61	86,86	86,99	
2.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	angka	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	85,5	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Permasalahan masih rendahnya tingkat kematangan praktek demokrasi masyarakat sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem upaya pematangan praktek demokrasi masyarakat mengingat demokrasi dan penyampaian aspirasi adalah hak asasi yang dijamin dalam undang-undang namun perlu diupayakan agar hak-hak demokrasi warga negara tidak bersinggungan bahkan menganggu hak-hak asasi warga negara lainnya.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

B. PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi dan permasalahan pembangunan yang ada di Kota Semarang serta dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah ini juga akan menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

B.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja setelah Renstra tahun 2025-2029 berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan, maka transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Tahun 2025
   Penyusunan Renja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman berpedoman pada visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tahun 2025-2029. Selanjutnya, Perubahan Renja Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Renja Tahun 2030
   Penyusunan Renja Tahun 2030 disusun tetap dengan berpedoman pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029 karena lingkup pengaturan indikasi program dan kegiatan pada dokumen Renstra dan RPJMD Tahun 2025-2029 berlaku sampai dengan tahun 2030.
3. Renja Tahun 2031
   Penyusunan Renja Tahun 2031 disusun dengan memperhatikan RPJPD Tahun 2025-2045 serta memperhatikan visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2030-2035.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001